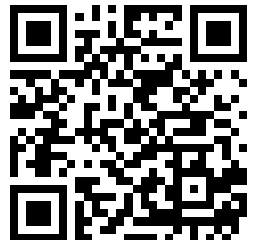

This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google™ books

<https://books.google.com>







Ch. 13, #1-15, 22-24

1-19, 21-24, INDO-5.388

NOMOR ISTIMEWA

WARTA

16-19
21



Perdagangan

RECEIVED
NOV 11 1966
UNIV. WIS. LIBRARY

AP
W299
P433
18
1



11

TAHUN KE-XVIII

18 MEI 1965

MADJALAH MINGGUAN

„WARTA PERDAGANGAN”

Diterbitkan oleh :

Departemen Perdagangan Dalam Negeri
beserta Urusan Perdagangan Luar Negeri
dari Kompartimen Luar Negeri/H.E.L.N.
dan Perdagangan Luar Negeri.

Pelindung :

J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/
Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri
BRIG. DJENDERAL A. JUSUF.

Pemimpin Umum :

Kepala Direktorat Marketing dan Research :
Ir. J. J. Pitoy M.A. econ.

Staf Redaksi :

Staf Direktorat Marketing dan Research.

Penanggung Jawab :

Kepala Seksi Publikasi Madjalah
Anwar B. Harahap.

Pembantu Tetap :

Prof. Ir. Teko Sumodiwirjo
Dr. J. Panglaykim
Kolonel Jusuf Ramli
R. Hertatijanto S.H.

Pembantu² Chusus :

Kolonel Usman Ismail
Major Drs. Sukadjat
Zahar
R. Isa
Drs. A. Aidit
Suprpto
Sudjadi
A. Karim Usman S.H.
Dudy Djaya

Alamat Redaksi dan Tata Usaha :

Madjalah „WARTA PERDAGANGAN”
Direktorat Marketing dan Research
Djalan Tanah Abang Timur No. 87
D J A K A R T A

Pelaksana/Pertjetakan :

Kepala Pertjetakan P.N. Karya Tjotas
Burdi Reksodirdjo.

Pembayaran uang langganan dilakukan dimuka dengan :

1. Penjetoran atas Rekening Madjalah
„Warta Perdagangan” Kode No: KB/
W.A. 104, pada Bank Indonesia —
Dj: Thamrin, Djakarta.
2. Dinas Giro dan Tjek Pos atau dengan
pos wissel jang langsung dialamatkan
kepada Tata Usaha Warta Perdagangan
Direktorat Marketing dan Research.

DAFTAR ISI

	Hal.
1. Ekonomi Nasional adalah kewaspadaan Nasional (sambutan J.M. Menteri Brig. Djen. A. Jusuf	1
2. Kata Pengantar dari Redaksi	2
3. Amanat Politik P.J.M. Presiden Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S.	3
4. Organisasi dan Susunan Urusan Perdagangan Luar Negeri	16
5. Organisasi dan Susunan Departemen Perdagangan Da.am Negeri	20
6. Reorganisasi P.D.N. menjadi P.N.N.	22
7. Pembentukan Perwakilan Departemen Perdagagan Dalam Negeri dan Urusan Perdagangan Luar Negeri ditiap ² ibu kota Daerah Tingkat I	24
8. Semua Perwakilan P.N.N. di Luar Negeri lang- sung dibawah Pres. Dir. B.P.U. Niaga	36
9. Key personnel dalam lingkungan Departemen Perdagangan Dalam Negeri dan Urusan Perdagagan Luar Negeri	27
10. Instruksi Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri kepada semua Eksportir	25
11. Target Ekspor tahun 1965	28
12. Seruan kepada semua Importir dan pemakai Devisa lainnja	30
13. Pelaksanaan Politik Impor tahun 1965	31
14. Pengumuman dan Seruan	32
15. Integrasi Wewenang Urusan Perdagangan Luar Negeri (Kep. Presidium Kabinet R.I. No. Aa/B/ 44/65).	33
16. Pendjelasan mengenai Organisasi dan Susunan baru Departemen Perdagangan Dalam Negeri dan Urusan Perdagangan Luar Negeri	34
17. Penetapan Target Nilai Ekspor Bahan Pertanian tahun 1965.	35
18. Adanja selisih antara angka nilai Ekspor menurut Direktorat Bea dan Tjukai dan angka penerimaan Devisa menurut Bank ² Devisa	36
19. Nilai Ekspor dan Nilai Impor tiap ² Negara	37
20. Kurs ² jang dipakai dalam bidang lalu-lintas devisa	38

ISI² WARTA PERDAGANGAN No. 2.

ANTARA LAIN TERDIRI DARI :

1. Amanat Politik Presiden/Pemimpin Besar Revolusi
Mandataris MPRS jang tidak dibatjakan.
2. Ketetapan MPRS No. V dan No. VI.
3. Surat Pendorong Produksi (SPP).
4. Organisasi dan Susunan Direktorat Marketing dan
Research.
5. D.l.l.

Keterangan Gambar kulit muka :

J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/
Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri
BRIG. DJENDERAL A. JUSUF.

Surat Izin terbit No. 21A/SK/UPPG/SIT-196
tanggal 17-4-1965.

EKONOMI NASIONAL adalah KEWASPADAAN NASIONAL

SAMBUTAN JANG MULIA MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI/
KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Brig. Djen. A. Jusuf.

Dalam rangka melaksanakan BERDIKARI dan BANTING STIR dalam bidang ekonomi yang diamanatkan oleh Pemimpin Besar Revolusi kita, pengaturan soal perdagangan serta penertiban aparat perdagangan yang dipertajakan oleh Pemimpin Besar Revolusi kepada kami untuk memimpinnja, haruslah seirama dengan amanat tersebut, baik tentang langkah-langkah kebidaksanaan yang akan ditempuh maupun perihal "reconditioning" dari tool-tool yang dipergunakan oleh Pemerintah dalam bidang perdagangan.

Dengan mendjunjung tinggi prinsip "Open management" dan agar segala funds and forces yang progresif-revolusioner dapat dikerahkan untuk memperkembangkan usaha perdagangan terutama perdagangan Luar Negeri yang diintegrasikan dengan politik luar negeri Negara Republik Indonesia dan merupakan tulang punggung bagi penyelesaian Revolusi Indonesia, maka sebagai salah satu usaha untuk mentjapai tujuan tersebut, kami anggap perlu untuk mengadakan suatu media yang diberikan fungsi disamping memberikan penerangan-penerangan mengenai usaha-usaha Departemen Perdagangan Dalam Negeri dan Urusan Perdagangan Luar Negeri dari Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri, juga dapat memberi bimbingan/petunjuk kepada seluruh potensi-potensi yang berketjimpung dalam bidang perdagangan.

Kita semuanya maklum, bahwa pada hakekatnja, perdagangan hanya merupakan salah satu segi dan persoalan perekonomian, bahkan dengan menempatkannya dalam suatu gelanggang yang lebih luas lagi kami yakin, bahwa perekonomian dalam banjak hal terdjalin tidak sadja dengan politik-ekonomi se-mata-mata akan tetapi djuga dengan soal-soal politik-psychologis.

Berbahagiaulah kita sebagai Bangsa Indonesia oleh karena dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, oleh P.J.M. Presiden telah diutjapkan kata-kata mutiara, dari mana kita senantiasa dapat menimba kekuatan-kekuatan baru, serta memperoleh moral courage untuk melaksanakan tugas-tugas kita masing-masing dalam bidang perekonomian yakni :

"Filsafat ekonomiku adalah heaven storming revolutionary spirit, combined with down-to-earth handling of problems as they arise". "Banting Stir" adalah sesuai dengan filsafat ekonomiku, sebab soal ekonomi bukan pertama-tama soal administrasi, bukan pertama-tama soal accountancy, apa lagi soal birokrasi. Soal ekonomi adalah pertama-tama soal orientasi, soal gerichtheid, soal adjusment kepada realitas".

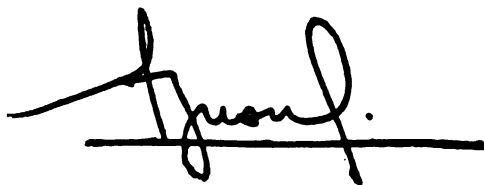
Dengan menjadari hal-hal tersebut, maka dalam usaha penjelenggaraan media ini, yang kami tugaskan kepada Direktorat Marketing dan Research, kami harapkan djuga bantuan dari seluruh aparat-aparat yang terdjalin erat dengan tugas dibidang perdagangan pada khususnya dan perekonomian pada umumnya. kiranya dengan demikian dapatlah tertjapai kesempurnaan bimbingan/petunjuk yang akan dihidangkan melalui media ini.

Bimbingan/petunjuk yang akan disadjikan dalam madjalah Warta Perdagangan, harus diarahkan pula kepada usaha membangkitkan inisiatif dan daya kreasi untuk menggali sumber-sumber yang dapat menambah national income serta untuk mempertinggi daya mampu dan kewaspadaan dari para pengusaha dibidang perdagangan dalam menghadapi dunia perdagangan internasional.

Achirnja kepada para pengasuh dan penjelenggara madjalah Warta Perdagangan kami pesankan, bahwa demi suksesnja tugas yang dipertajakan kepada saudara-saudara tersebut, bekerdjalah dengan penuh pengabdian setjara seorang guru terhadap anak-didiknya dan sebagai pengemban amanat penderitaan rakyat.

Semoga segala usaha yang dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan Negara Republik Indonesia diredhoi oleh Tuhan Jang Maha Esa.

MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI/
KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI.



A. JUSUF
(Brig Djen T.N.J.)

Kata Pengantar dari Kedaksi

Kepada J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri, yang telah berkenan memberikan sambutannya berkenaan dengan dikeluarkannya penerbitan pertama dari Madjalah "Warta Perdagangan", sebagai media resmi dari Departemen Perdagangan Dalam Negeri dan Urusan Perdagangan Luar Negeri dari Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri, dengan ini dihaturkan banyak terima kasih, baik atas kepertjajaan yang diberikan Jang Mulia kepada Direktorat Marketing dan Research yang ditugaskan sebagai pengasuh dan penjelenggara dari media ini, maupun terhadap pedoman-pedoman dan pegangan yang telah dipesankan oleh beliau demi suksesnja pelaksanaan tugas yang telah digariskan.

Sebagai pengganti dari Warta Ekonomi yang mulanja dikeluarkan oleh Kementerian Perekonomian, penerbitan ini adalah nomor pertama dari Madjalah Warta Perdagangan, sedangkan bila ditilik dari isinja nomor ini boleh dikatakan merupakan suatu penerbitan istimewa.

Amanat "Berdikari" yang diutjapkan oleh P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. didepan sidang ke-III dari Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara pada tanggal 11 April 1965 di Bandung dimuat sekaligus dalam keseluruhan ruhannya, bukan sadja oleh karena isi lengkapnja wadjib diketahui, dimengerti dan ditjalkan oleh setiap warga negara Indonesia, bahkan merupakan titik pangkal, dasar kerjda serta sumber inspirasi untuk penerbitan-penerbitan selandjutnja dari Madjalah ini.

Banting Stir dalam bidang ekonomi, dalam hal ini Banting Stir dalam bidang perdagangan, seperti yang telah ditjetuskan oleh J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri, ialah tindakan penjempurnaan prasarana c.q. aparatatur Pemerintah yang bertugas dalam bidang Perdagangan, yakni dengan ditetapkannya : Organisasi dan Susunan Departemen Perdagangan Dalam Negeri, Organisasi dan Susunan Urusan Perdagangan Luar Negeri dari Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri, Organisasi dan Susunan Perwakilan Departemen Perdagangan Dalam Negeri dan Urusan Perdagangan Luar Negeri di tiap-tiap Ibu Kota Daerah Tingkat I, pengintegrasian dari 9 Perusahaan Dagang Negara mendjadi 6 Perusahaan Niaga Negara dan penempatan Tjabang-Tjabang/Perwakilan Perwakilan Perusahaan Niaga Negara yang berkedudukan diluar Negeri setjara teknis, taktis dan fungsionil langsung dibawah koordinasi Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri c.q. Badan Pimpinan Umum Perusahaan Niaga Negara.

Disamping ketetapan-ketetapan mengenai Organisasi dan Susunan dari aparat-aparat Pemerintah dalam bidang perdagangan, dalam nomor ini dan dalam mendjalankan operasi management ditjantumkan djuga nama-nama dari pedjabat/petugas (keypersonnel) yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk memimpin pelaksanaan tugas dan kegiatan dari tiap-tiap unit organisasi yang telah ditetapkan.

Meningkat pada peraturan², pengumuman dan seruan yang dimuat dalam nomor istimewa ini, nampaklah kiranya „a r a h” dari langkah-langkah kebidjaksanaan yang diambil oleh Pemerintah dalam bidang Perdagangan Luar Negeri.

Beberapa persoalan-persoalan dalam bidang perdagangan internasional dapat didjumpai dalam press-release dari Menteri Urusan Bank Sentral mengenai adanya selisih antar angka-angka dari Direktorat Bea dan Tjukai dan angka-angka dari Bank Devisa, analisis angka-angka nilai ekspor dan nilai impor untuk tiap-tiap negara tertentu dan pengumuman Biro Lalu Lintas Devisa mengenai koers-koers yang dipergunakan dalam lalu lintas devisa.



AP
W299
P433
18

B E R D I K A R I

(BERDIRI DIATAS KAKI SENDIRI)

AMANAT POLITIK PRESIDEN/PEMIMPIN
BESAR REVOLUSI/ MANDATARIS M.P.R.S.

pada pembukaan :

SIDANG UMUM M.P.R.S. KE III

tanggal 11 April 1965



I. PENDAHULUAN.

Saudara-saudara, saya sebenarnya mempunyai dua rangkaian Amanat tertulis, tetapi berhubung dengan waktu, saya akan batjakan hanja satu saja, sedang jang lain nanti dalam bentuk ditjetak akan disampaikan djuga kepada Saudara-saudara.

Saudara-saudara sekalian, chusunsja Saudara-saudara para Anggota MPRS.

1. PEMBUKAAN SIDANG UMUM M.P.R.S. Ke III.

Hari ini adalah tanggal 11 April 1965. Pada hari ini kita sekalian jang hadir dalam Gedung MPR ini melakukan *Pembukaan* Sidang Umum MPRS jang ke-III jang dihadiri djuga oleh Tamu Negara kita teman-seperjuangan dan sahabat-karib Jang Mulia Perdana Menteri Republik Demokrasi Rakjat Korea KIM IL SUNG.

Mari kita tepuk tangan.

2. KEPUTUSAN PRESIDEN R.I. No. 52 TAHUN 1965.

Seperti dikatakan oleh Saudara Ketua tadi, memang pada hari ini *Pembukaan* Sidang Umum

MPRS jang chusus ini, saja selaku Presiden/ Pemimpin Besar Revolusi dan Mandataris MPRS. Insja Allah, akan mengutjapkan AMANAT-POLITIK sesuai dengan Keputusan Presiden No. 52 tahun 1965.

Memang Saudara² sekalian, Sidang Umum MPRS ke-III ini sungguh *chusus*, bahkan mungkin *amat-chusus*, karena Sidang Umum ini setjara chusus dilangsungkan *dalam rangka* dan *dalam hubungan* dengan segala sesuatu jang telah kita alami bertahun² ini dan pula didalam gedung jang bersedjarah ini.

Djuga *suasana* dan *situasi* *perkembangan* Revolusi kita pada tingkatan nasional dan internasional seperti kita alami sekarang ini, benar-benar memberikan tjiri chusus dan sifat jang amat penting, bahkan maha-penting, kepada Sidang Umum MPRS jang ke-III ini!

Oleh sebab itulah, saja katakan, Sidang Umum MPRS ini adalah chusus; kali ini kita melangsungkan *Sidang Chusus* MPRS!

Kita melangsungkan Sidang Chusus MPRS ini dihadapan pandangan dan perhatian daripada seluruh Rakjat kita, jang sedang berdjuang mati²an dalam geloranjaja perdjjuangan — DWIKORA!

Kita melangsungkan Sidang Chusus MPRS ini dihadapan pandangan dan perhatian *seluruh*

U n t a pada saat memuntjaknja perjuang-
KONFRONTASI kita terhadap lawan-lawan Re-
volusi Indonesia !

Oleh sebab itu, sadarlah hendaknja *seluruh*
Rakjat Indonesia, terutama para Anggota MPRS
sebagai Wakil-wakil Rakjat kita, bahwa kita se-
lang berada ditengah-tengah kantjiah-perjuang-
an mati-matian menghadapi Nekolim serta antek-
anteknja, untuk memenangkan Revolusi kita !

Insjafilah hai *seluruh* Rakjat Indonesia,
dan segenap Anggota MPRS, akan tuntutan-sedja-
rah pada tingkatan memuntjaknja perjuang-
an kita dalam bidang nasional dan internasional un-
tuk memenangkan Revolusi kita ini !

1. POLITIK.

1. REVOLUSI INDONESIA.

Saudara-saudara sekalian, chususnja para Ang-
gota MPRS.

Pada bagian terachir dalam Pidato saja TAVIP,
telah saja tandaskan, bahwa „Revolusi Indonesia
itu adalah memang satu Revolusi MAHABESAR,
jang mengedjar satu idee, IDEE BESAR !, jakni :
MELAKSANAKAN AMANAT PENDERITAAN
RAKJAT INDONESIA, dan AMANAT PENDE-
RITAAN RAKJAT *D I S E L U R U H M U -
K A B U M I ! !*

Nah, sadarkah kita semuanja akan tugas itu ?
Insjafkah Saudara-saudara sebagai WAKIL RAK-
JAT, dan sebagai ALAT REVOLUSI, akan beban-
kewadajiban sedjarah itu ?

Saja tandaskan sekali lagi, apa jang telah kuka-
takan dalam DEKON : Revolusi kita adalah „Re-
volusi *K e r a k j a t a n* dalam abad ke-20 !”.

Hal inilah jang harus kita sadari! Hal inilah jang
harus kita insjafi, jang harus kita insjafi sedalam-
dalamnja, jang harus kita resapkan sampai tulang-
sungsum kita !

Amanat Penderitaan Rakjat adalah *d a s a r*
Revolusi kita.

Dan, Amanat Penderitaan Rakjat itu pulalah
u d j u a n Revolusi kita !

Seperti telah kukatakan pada Pembukaan Si-
dang Pertama MPRS ini ditahun 1960, kita semua
uni berdjuaug untuk *m e l a k s a n a k a n* Ama-
nat Penderitaan Rakjat. Kita semua adalah *a l a t*
untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat
itu.

Saudara-saudara sebagai *w a k i l* Rakjat, dan
aku sebagai *a b d i* Rakjat — aku sebagai *p e -
n j a m b u n g - l i d a h* Rakjat, KITA-SEMUA
adalah *p e l a k s a n a* Amanat Penderitaan Rak-
jat itu !

Memang, kita-semua *p a d a u m u m n j a* te-
lah tahu, telah mengerti, bahwa kita-semua adalah
pengemban Amanat Penderitaan Rakjat dan pelak-
sana Amanat Penderitaan Rakjat itu. Tetapi.....
jang sering *d i l u p a k a n*, dan jang sering
t i d a k - d i m e n g e r t i, ialah : bahwa kita ini
adalah pengemban dan pelaksana Amanat Pende-
ritaⁿ Rakjat *seluruhnja*. SELURUH-

RAKJAT-SEBULAT-BULATNJA !, dan *sekal*
lagi : *Seluruh-Rakjat-sebulat-bulatnja ! !*

Kita berdjuaug mengemban Amanat Penderita-
an Rakjat Indonesia dalam persatuan dan kesatu-
annja jang bulat-menjeluruh, tanpa pengetjuaugian !

Hal inilah jang sering *d i l u p a k a n* orang!
Hal inilah jang *s e n g a d j a* kadang² dilupakan!
jang sengadja kadang² *t i d a k - d i m e n g e r t i*
jah jang sengadja kadang² dikorup !!, dan jang se-
ngadja *d i s e l e w e n g k a n* oleh Pemimpin-
pemimpin jang menamakan dirinja pemimpin te-
tapi sebenarnja adalah pemimpin² gadungan !

Apa sebab kukatakan demikian? Karena banjak
zogaannde Pemimpin Rakjat berteriak-teriak,
berkaok-kaok mengatakan berdjuaug melaksana-
kan Amanat Penderitaan Rakjat, tetapi njatanja
hanja untuk Rakjat *g o l o n g a n n j a* sendiri
sajja, Rakjat *k o n t j o n j a* sendiri sajja. Pe-
mimpin-pemimpin sematjam itu membanting-tu-
lang dan memeras otak dan keringatnja melaksa-
nakan, — katanja! — Amanat Penderitaan Rakjat,
tetapi njatanja, mereka meng-korup Amanat Pen-
deritaan Rakjat sendiri, menodai Amanat Pende-
ritaⁿ Rakjat sendiri, mengchianati Amanat Pen-
deritaan Rakjat sendiri, untuk kepentingan golo-
ngannja sendiri, untuk kepentingan kontjo-kontjo-
nja sendiri, untuk kepentingan kliknja sendiri, ja,
bahkan untuk kepentingan dirinja sendiri! Dengan
segala siasat dan taktik terbuka atau tertutup
sambil melambungkan teori-teori jang-katanja
revolusioner, Pemimpin-pemimpin sematjam itu
plintat-plintut menjesatkan Rakjat, kasak-kusuk
mempermainkan dan menunggangi Rakjat selu-
ruhnja, untuk kepentingan golongannja sendiri,
komplotannja sendiri, dirinja sendiri !!

Memang Saudara-saudara sekalian, rasanja
perlu saja sinjalir dengan blak-blakan. Rasanja
perlu saja tundjuk-tundjuk dengan terang-tera-
ngan, saja kritik dengan djelas-djelasan, sebelum
orang menjadarkan diri bahwa apa jang diper-
buatnja itu adalah *p e n j e l e w e n g a n* ter-
hadap kepada *p r i n s i p* Revolusi kita,
dan merupakan *s a t u d e c a d e n s i* daripada WA-
TAK-AGUNG Revolusi Indonesia!, jang berda-
sarkan Pantjasila, jang berdasarkan Sosialisme
Indonesia, jang berdasarkan DEMOKRASI-
TERPIMPIN !

Sifat dan watak Pantjasila, Sosialisme Indone-
sia dan Demokrasi Terpimpin djustru selalu men-
dahulukan KEPENTINGAN-UMUM, kepentingan
Negara, kepentingan objektip daripada Revolusi,
memerangi kemaksjiaan ego-sentrisme, jang men-
djadi dasar pandangan hidup individualisme, libe-
ralisme dan sistim demokrasi-liberal, jang harus
kita hantjur-leburkan sampai habis !

Dari tempat inilah kuserukan kepada Saudara-
saudara sekalian sebagai Pemimpin-pemimpin rak-
jat, sebagai Anggota daripada Madjelis Tertinggi
Republik Indonesia, untuk segera *m e n g a m a n -
k a n* djalannja Revolusi kita dan memberantas ke-
munduran-kemunduran daripada *k a r a k t e r* kita
sebagai alat-Revolusi !

Dalam Tavip telah kudjelaskan dengan tegas dan tandas, bahwa jang harus kita galang adalah PERSATUAN - NASIONAL - PROGRESSIP-REVOLUSIONER, karena Revolusi Indonesia memang progressip-revolusioner dalam teori dan dalam prakteknja, dalam watak dan dalam sifatnja!!

Apakah masih kurang djelas dan gamblang pendjelaskan-pendjelasan dan penegasan-penegasan saja berulang-kali disetiap tempat aku bitjara tentang Revolusi kita?

Mari kita melakukan *introspeksi* terhadap diri kita masing-masing untuk mengetahui kelemahan-kelemahan kita sendiri, untuk menjadari penjelewengan-penjelewengan kita sendiri terhadap kepada prinsip² Revolusi kita, guna segera melakukan „banting stir” dalam djiwa dan alam-pikiran kita, dan segera kembali kepada relnja Revolusi jang asli, jaitu relnja DEMOKRASI TERPIMPIN!

Dengan bangga dan gembira saja mengikuti dan menkonstatir *meresapnja* kesadaran ber-Pantjasila meresapnja kesadaran ber-Manipol-Usdek, meresapnja kesadaran ber-Nasakom, meresapnja ber-Demokrasi Terpimpin dikalangan Rakjat seluruhnja!

Tetapi, masih djuga terlihat gejala-gejala untuk menafsirkan dan mempraktekkan prinsip-Revolusi kita jang abadi itu menurut „kemauan² sendiri-sendiri”! Seperti telah kusinjalin adanya orang-orang jang menerima Pantjasila dengan hanja mengambil sila-silanja jang disukainja sadja, dengan mempreteli Pantjasila dari KESATUAN-SILA-SILANJA, sekarang djuga nampak adanya gejala-gejala menafsirkan dan mempraktekkan NASAKOM dengan mempreteli Nasakom itu dari hakekat dan wujud kesatuannja! Mereka menerima Nasakom dalam tafsiran sebagai KUMPU-LAN UNSUR-UNSURNja, dalam pengertian rangkaian unsur-NAS ditempelkan pada unsur-A disambung dengan unsur-KOM, tetapi samasekali tidak menangkap djiwa dan watak persatuan dan kesatuan-nasional-progressip-revolusioner daripada NASAKOM itu sebagai *perasaan* daripada Pantjasila!

Pengalaman perdjjuangan pergerakan Nasional dan Internasional kita telah menundjukkan dengan djelas, bahwa untuk mewujudkan ketiga kerangka tudjuan Revolusi kita itu, satu-satunja dasar, satu-satunja prinsip perdjjuangan adalah : KESATUAN NASAKOM!

Tidakkah kita mengerti, menginsjafi, mejakini kenjataan-kenjataan sedjarah, bahwa kekuatan-NAS sendiri sadja kurang-sanggup dan tidak-mampu untuk merebut kemerdekaan dan memelihara perdamaian, baik nasional maupun internasional? Tidakkah kita tahu dan mengerti bahwa kekuatan-A sendiri-sadja tidak berhasil melahirkan kemerdekaan dan mempertahankan perdamaian, baik nasional maupun internasional? Dan sanggupkah kekuatan-KOM sendiri-sadja mendatangkan kemerdekaan dan menggalang perdamaian, baik nasional maupun internasional? Tidak, sedja-

rah pergerakan kita menundjukkan dengan pasti : *tidak!*, sekali lagi : *tidak!*

Pengalaman-pengalaman pergerakan kita menundjukkan *keharusan objektip* adanya PERSATUAN DAN KESATUAN NASAKOM jang progressip-revolusioner untuk mewujudkan ketiga kerangka tudjuan Revolusi kita, baik nasional maupun internasional.

Sekali lagi, jakinlah hai Rakjatku, jakinlah sejakin-jakinnja, bahwa hanja *persatuan* dan *kesatuan* Nasakom itulah *dasar-perdjjuangan* jang kokoh sekokoh-kokohnja, kuat sekuat-kuatnja, jang ampuh seampuh-ampuhnja, untuk mewujudkan ketiga kerangka tudjuan Revolusi kita jang maha-besar itu!

Insjallah, bahwa Revolusi kita mengedjar satu IDEE BESAR, jaitu : melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat Indonesia dan Amanat Penderitaan Rakjat DISELURUH MUKA-BUMI, satu Amanat jang sungguh² MAHA-BESAR. Oleh sebab itu, dasar Revolusi kitapun harus *besar*, dasar PERSATUAN DAN KESATUAN NASAKOM!!

Dalam tahun 1965 ini akan genap 20 tahun kita merdeka dan ber-Negara Republik Indonesia! Dengan Republik Indonesia sebagai sendjata-jang-paling-tadjam untuk menggerakkan Revolusi-besar kita, selama 20 tahun jang lalu itu, segenap perhatian dan usaha kita djuruskan kearah penjelesaian tahap-pertama daripada Revolusi kita, yakni : tahap NASIONAL DEMOKRATIS.

Menurut keadaan-keadaan jang njata dan hasil-hasil jang telah kita tjapai, sekarang tahap Nasional Demokratis itu sudah *hampir selesai*. Dalam tahap Nasional Demokratis ini, Revolusi kita telah mendjebol nekolim dan feodalisme untuk dapat menjelenggarakan tata-kehidupan Nasional jang demokratis.

Sekarang kita melangkah ke-tahap selandjutnja. Revolusi kita mulai *memasuki* tahap jang kedua : jaitu tahap SOSIALISME INDONESIA.

Tahap-kedua ini adalah djustru tahap *Pembangunan*! Kita harus membangun! Kita harus bekerdja keras, kita harus membanting-tulang, memeras kita punja tenaga untuk membangun Sosialisme Indonesia itu!

Seperti telah berulang-ulang-kali kukatakan, Sosialisme tidak akan djatuh begitu sadja dari langit seperti air embun diwaktu malam, tetapi Sosialisme harus kita bangun, harus kita bina, harus kita *perdjungkan*!

Untuk dapat melaksanakan, mengsukseskan pembangunan Sosialisme sebagai tahap-kedua daripada Revolusi kita sekarang ini, kita harus menghantjur-leburkan kapitalisme dan nekolim karena kapitalisme dan nekolim itulah lawan Sosialisme, musuh-bebujutan daripada Sosialisme!

Sosialisme jang akan kita bangun adalah Sosialisme Indonesia, jaitu : SOSIALISME BERDASARKAN PANTJASILA. Kita harus membanting tulang, memeras otak dan memeras keringat untuk membangun sjarat-sjarat bagi masyarakat *Sosialis*

Indonesia itu, jaitu: Masyarakat adil dan makmur, adil dan makmur materiil dan spirituil berdasarkan Pantjasila. Masyarakat Sosialis sematjam itu adalah masyarakat Sosialis dengan sjarat-sjarat sosial-ekonomis jang tinggi, dengan alat-alat hidup jang setinggi-tingginja, alat komunikasi jang semodern-modernnja, suatu masyarakat dalam taraf elektronis, jang tjukup sandang dan tjukup pangan.

Untuk menjelenggarakan Masyarakat Sosialis, kita harus melantjarkan pembangunan *setjara berentjana*, karena pembangunan Sosialis adalah pembangunan berentjana, jaitu: PEMBANGUNAN TERPIMPIN.

Praktek-praktek liberal dalam pembangunan. harus kita kikis habis sama sekali. Segala kegiatan pembangunan Negara dan Masyarakat harus kita satukan mendjadi „One coordinated Unit”, „One coordinated Pool”!

Hanja dengan persatuan dan kesatuan gerak-usaha pembangunan jang dipimpin itulah, Masyarakat Sosialis Indonesia dapat segera kita wujudkan. Taraf pertumbuhan Revolusi kita sekarang menuntut daripada kita disiplin-sosial jang lebih tinggi dan lebih mantap daripada waktu jang sudah-sudah.

Terpimpin oleh satu Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana, kegiatan Pemerintah dan Masyarakat harus kita tingkatkan dan djuruskan kearah tertjiptanja Tata-Perekonomian berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Dasar kita 1945 jaitu EKONOMI TERPIMPIN.

4. SITUASI POLITIK NASIONAL.

Sedjak kuutjapkan pidatoku TAVIP pada tanggal 17 Agustus 1964, perkembangan Revolusi kita mengikuti garis-pertumbuhannja jang selalu meningkat, terus-menerus meningkat makin tinggi menudju perwujudan tudjuannja jang sungguh besar. Revolusi kita berdjalan dengan deras, lari dengan tjepat langsung menudju kesasarannja.

Dengan telah terselesaikannja keamanan di Sulawesi Selatan, tamatlah riwayat gerombolan-gerombolan pengatjauan keamanan dalam-negeri kita.

Sedjak tertembak-matinja Kahar Muzakkar pada tanggal 3 Pebruari tahun ini, berachirlah gangguan dan pengatjauan kehidupan Rakjat Sulawesi-Selatan. Dan sekarang Rakjat telah kembali kerumah-ladangnja masing-masing, bebas dari ketakutan dan antjaman, untuk melandjutkan pembangunan disegala bidang. Rakjat Sulawesi-Selatan telah mendapatkan kembali kegairahan dan kegembiraan kehidupannja, untuk segera bertjantjut-tali-wondo menjingsingkan lengan-badju-nja, memeras keringat dan membanting tulang untuk membangun Sulawesi-Selatan mendjadi *l u m b u n g - p a n g a n* daripada Republik Indonesia.

Pemerintah dan segenap Rakjat diseluruh Tanah-air ikut bersuka-gembira dengan Rakjat Sula-

wesi-Selatan dan bersjukur kehadirat Allah s.w.t. serta berterima kasih kepada Angkatan Bersendjata kita, jang telah menjelesaikan tugasnja dengan sempurna.

Peristiwa PROKLAMASI BEBAS BUTA HURUF segenap Rakjat seluruh Indonesia pada tanggal 31 Desember 1964, jang diikuti dengan KOMANDO PELAKSANAAN KEWADJIBAN BELADJAR diseluruh Indonesia menambah betapa besarnja „National achievement” Revolusi kita jang sungguh-sungguh mengangumkan Dunia!

Revolusi Indonesia njata-njata adalah Revolusi MAHA-BESAR, jang telah membuat Rakjat kita mendjadi Rakjat jang besar daja-djuang dan presjang sungguh-sungguh mengagumkan Dunia!

Ditengah-tengah Rakjat jang berdjulang, Rakjat jang menggelora semangat-revolusionernja dalam melaksanakan Revolusi Pantjamuka kita ini, terlihatlah persatuan dan kegotong-rojongan-nasional progressip-revolusioner jang makin kokoh dan mendalam disertai dengan disiplin-nasional jang membadja!

Sungguh pantas disajangkan, bahwa sementara Pemimpin-pemimpinja telah terkena oleh godaan sjaitan--pertjektjokan dan digerumuti oleh djabakan-djabakan liberalisme dan infiltrasi daripada subversi nekolim.

Untuk mengembalikan kerukunan, untuk membina kesatuan dalam tubuh Revolusi dan gerak-perdjuaan kita jang sedang memuntjak itu, sampailah Presiden/Pemimpin Besar Revolusi menemukan 10 Partai Nasakom pada tanggal 1 Desember 1964 di Istana Bogor, jang Alhamdulillah, dapat mengembalikan persatuan atas dasar ikatan-kebulatan-tekad, jang kini terkenal dengan nama: DEKLARASI BOGOR.

Deklarasi Bogor itulah kebulatan tekad Partai-partai Nasakom kita. Deklarasi Bogor itulah tjepit persatuan dan kesatuan tekad Partai-partai Nasakom kita. Deklarasi Bogor itulah jang harus kita laksanakan dengan konsekwen, jang harus kita wujudkan dengan utuh, demi kemenangan Revolusi kita, demi kedjajaan dan kebesaran perdjuaan Rakjat kita. Tidakkah mendjadi kewadiban kita semua, chususnja para Pemimpin Partai-partai penandatanganan Deklarasi Bogor, untuk melaksanakan kebulatan tekad itu?, untuk menanankan kebulatan tekad itu kepada para anggota-anggotanja, kepada para pengikutnja, dan kepada seluruh Rakjat Indonesia?, agar betul bulat-sebulatnja tekad-kita untuk mengamalkan apa jang tersurat dan tersirat dalam Deklarasi Bogor itu? Adalah mendjadi kewadjaban Pimpinan Partai-partai untuk mengokohkan persatuan-nasional kita, untuk menggembleng Kesatuan-nasional Rakjat kita, untuk mengamankan kebulatan-tekad Rakjat kita, guna memenangkan Revolusi Indonesia!!

Sebagai MANDATARIS MPRS saja mengadji saudara-saudara untuk segera „membantistir”, untuk segera mengoreksi diri, untuk segera

mengikis-habis kelemahan-kelemahan kita, guna memperkuat KETAHANAN Revolusi kita.

Ja, ketahanan Revolusi kita, sekali lagi ketahanan Revolusi kita!, ketahanan setjara mental dan phisik, setjara rochaniah dan lahiriah, ketahanan Revolusi kita dari dalam dan dari luar! Djustru inilah Komando pertama daripada DWIKORA, jang kita laksanakan bersama-sama menudju kemenangan jang sempurna.

Karena Dwikora, beribu-ribu, puluhan ribu, ja, bahkan berdjuta-djuta Rakjat kita mentjatkan diri menjadi Sukarelawan untuk membantu perdjjuangan Rakjat-rakjat Malaya, Singapura, Serawak, Brunai dan Sabah, guna menengjahkan nekolim dan anteknja „Malaysia” dari Asia-Tenggara. Politik konfrontasi kita terhadap „Malaysia” dengan komplotan nekolim Inggris, Australia, Selandia-Baru, Amerika Serikat dan nekolim lainnja jang berdiri dibelakang „Malaysia” itu kian hari kian meningkat dan kita laksanakan disegala bidang.

Perdjjuangan Dwikora menggegap-gempita menggegerkan dan menggojahkan negara-boneka „Malaysia” menudju kehantjurannja. Perdjjuangan Dwikora meluap-menggelora, menggegerkan dan membuat kalang-kabut nekolim di Asia-Tenggara dan nekolim diseluruh dunia. Adalah keharusan-sedjarah, bahwa perdjjuangan Dwikora kita pasti menang!! Nekomim dan anteknja „Malaysia” pasti hantjur-lebur tersapu dari persada Asia-Tenggara. Ini adalah kejakinan-kuat laksana-badja seluruh Rakjat Indonesia dan segenap kekuatan-kekuatan progressip diseluruh dunia!!

Adalah prinsip-dasar dan strategi-Revolusi kita, bahwa kita akan menengjahkan pendjadjahan dari seluruh muka bumi, karena tidak sesuai dengan perikeadilan. Oleh sebab itu, mementingkan Dwikora dengan sempurna, adalah soal prinsip bagi kita. Menghantjurkan boneka-Inggris „Malaysia” dan mendesak-keluar nekolim dari persada Asia-Tenggara dan Asia-Afrika adalah „a matter of principle” daripada Revolusi kita. Atas dasar prinsip dan garis strategi inilah Revolusi Indonesia meningkat, meninggi terus-menerus didalam gerak-terdjangnja menggempurkan palu godam-persatuan Rakjat dan kekuatan-kekuatan progressip-revolusioner diatas kepala-batu nekolim dan anteknja „Malaysia”.

Mendjalankan politik-konfrontasinja dengan semangat jang meluap-luap, Rakjat Indonesia bergerak-serentak melaksanakan Revolusinja untuk membersihkan Asia-Tenggara dari tjengkeraman dan isapan nekolim serta anteknja „Malaysia”, jang didirikan untuk mengepung dan menjerimpung Revolusi Indonesia. Disebabkan meningkatnja kekurang-adjaran nekolim dimana-mana, chususnya di Vietnam dan di Konggo, meluaplah amarah Rakjat, hingga petjahlah gelombang demonstrasi-demonstrasi jang mendorong kepada tindakan-tindakan pengambil-alihan usaha² dan

perusahaan² imperialis Inggris dan Amerika, jang kemudian diserahkan kepada Pemerintah.

Sedjalan dengan strategi dan taktik nekolim untuk mempertahankan kedudukannja dan membalas gerakan-gerakan Rakjat itu, dilepaskanlah kedalam masjarakat kita usaha subversi, infiltrasi dan adu-domba daripada kaki-tangannja, hingga disana-sini menimbulkan pertentangan dan bentrokan diantara Rakjat kita jang terkena oleh provokasi mereka itu. Chusus dalam bidang ekonomi nekolim melepaskan kaki-tangannja guna mengatjaukan harga dan peredaran uang kita.

Untuk menanggulangi aksi-aksi subversi nekolim jang makin lama makin membabi-buta itu. Pemerintah Republik Indonesia memperkuat aparat penangkisannja dengan membentuk Komando Pertahanan Anti-Subversip (KOHANSUB), baik dipusat maupun didaerah-daerah, selagi meningkatkan kewaspadaan nasional setinggi-tinginja.

Saudara-saudara, memang, „Malaysia” didirikan oleh imperialis Inggris untuk mempertahankan kedudukannja di Timur-Djauh, untuk melangsungkan dan melanggengkan „life-line of imperialism”-nja, jang membentang sebagai kukatakan dari Selat Djibraltar kearah Timur lewat Lautan Tengah, Terusan Suez, Lautan Merah, Samudra Indonesia dan Selat Sumatera membelok ke-Utara lewat Laut Tiongkok Selatan sampai ke-Lautan Djepang. Untuk mempertahankan „Malaysia”, dalam komplotannja antara Inggris, Australia, Selandia-Baru, Amerika Serikat dan negara-negara nekolim lainnja.

Nah, saudara-saudara sekalian dan seluruh Rakjat Indonesia, ketahuilah dengan djelas, bahwa satu-satunja musuh Revolusi kita adalah djustru nekolim itu, dan bahwa sekali-kali saudara-kita-sebangsa, saudara kita sendiri-setanah-air. Oleh sebab itu, pereratlah persatuan dan kesatuan diantara kita sendiri! Tingkatkanlah daja-djuang dan sepak-terdjang revolusioner kita! Padukanlah segenap semangat dan kekuatan Rakjat revolusioner kita untuk digempurkan kepada nekolim dan antek-anteknja!! Kita yakin, kita telah hakkul-jakin, bahwa politik-konfrontasi kita pasti menang, karena tindakan kita adalah benar, karena perdjjuangan kita adalah sesuai dengan tuntutan-sedjarah

Kita memperkuat dan meningkatkan semangat perdjjuangan Rakjat, kita memperkuat dan meningkatkan pembangunan Angkatan Bersendjata kita, sesuai dengan tuntutan suasana dan tingkatan perdjjuangan Revolusi kita. Seperti beberapa hari jang lalu kukatakan kepada Seminar Angkatan Darat, hendaknja Angkatan Bersendjata kita segera „membanting stir” pula dalam tindjauan dan tanggapannja terhadap kepada situasi dan lapangan perdjjuangan kita, dengan menentukan „defence policy” Negara kita dalam situasi dan pertumbuhan „global constellation” daripada dunia dewasa ini.

Menghadapi perkembangan-perkembangan internasional yang mengandung unsur-unsur antjaman terhadap kepada Revolusi Indonesia dengan segala gerakan infiltrasi dan subversinja, kita harus tetap mempertahankan dan meningkatkan bangunan penangkisannja disegala bidang, baik bidang politik, bidang diplomatik, bidang militer, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang kebudayaan. Kita harus mengerahkan dan memobilisasi segala kekuatan progressip-revolusioner, baik nasional maupun internasional, untuk menangkis dan menghantam kembali serangan nekolim. Oleh sebab itu, disamping memperkuat „home front” dalam segala bidang kita harus meningkatkan usaha-internasional, solidaritas Asia Afrika dan solidaritas NEFO, untuk memerangi dan menghantjurliburkan nekolim, sebagai sjarat-mutlak untuk membina satu Dunia-Baru.

5. SITUASI POLITIK INTERNASIONAL.

Saudara-saudara sekalian,

Meninjau perkembangan situasi politik internasional dewasa ini, terlihatlah dengan djelas terdesaknja nekolim dimana-mana. Di Afrika, di Asia, tempat berpidjak dan berkiprahnja nekolim berabad-abad lamanja itu, mereka digempur dan didesak-mundur oleh kekuatan dan perjuangan Rakjat-rakjat yang telah sadar akan harga dirinja, dan yang telah bangkit merebut kembali kemerdekaan Negara dan Bangsa.

Sepanjang „garis-hidup imperialisme” dari selat Djibraltar sampai Lautan Djepang, nekolim rontok menudju kegugurannja, karena terdesak oleh perjuangan Rakjat progressip-revolusioner dan terdjepit posisinja.

Nekolim sudah kehilangan akal dan mendjadi mata-gelap; mereka mendjalankan praktek² keganasan diluar batas² perikemanusiaan. Lihatlah praktek-praktek keganasannja di Vietnam, di Konggo! Perhatikanlah praktek-intrik subversip dan infiltrasinja di Asia-Tenggara, di Semenanjung Arabia, di negara² Afrika! Lihatlah aksi subversi-infiltrasi dan provokasi, intimidasi terhadap Republik Indonesia! Lihatlah permainan-kedji dan praktek kotor-manipulasinja di PBB dengan permainan-sandiwaranja mendudukan negara-boneka „Malaysia” di Dewan Keamanan, dengan meng-indjak² ketentuan prosedur dan segala ketentuan yang ada, hingga memaksa Indonesia hidjrah meninggalkan PBB, yang telah diselewengkan dari prinsip² Piagamnja itu.

Memanglah, memang sudah demikianlah tabiat nekolim. „Nekolim im Niedergang”! Kita harus gempur terus, kita harus terdjang terus, kita harus terus-menerus menjerang nekolim disepandjang djalan „life-line”-nja, sampai hantjur-lebur tersapu dari muka bumi !!

Buatlah „life-line of imperialism” ini mendjadi „dead-line of imperialism”.

Seperti telah kukatakan berulang-kali, dalam konstelasi dunia dewasa ini, memang hanja ada 2

kekuatan yang saling berhadapan, jaitu : Kekuatan progressip-revolusioner-dunia-baru dan Kekuatan nekolim. Kekuatan dari pada „the New Emerging Forces” melawan Kekuatan „the Old Established Forces”. Oleh sebab itu, kita harus memeras-keringat dan membanting-tulang untuk mempersatukan, untuk menguatkan dan mengkokohkan persatuan daripada the New Emerging Forces, guna digempurkan kepada kekuatan dan kedudukan-terakhir daripada the Old Established Forces !

Keretakan dan keguguran posisi-dominasi dari pada the Old Established Forces terlihat djelas dalam berpindahnja kiblat-politik internasional dewasa ini.

Djika pada permulaan Revolusi, kita hanja mendgenal 2 centra-politik-dunia, jaitu : Washington bagi blok Barat dan Moskow bagi blok Timur, maka sekarang telah dimulai timbul dengan perdirian dan arah-politiknya sendiri terlepas dari diktat Washington. Kairo berusaha untuk mendjadi di pusat-Dunia-Arab. Addis-Abeba mendjadi mendjadi pusat-kedudukan persatuan Afrika, sedang di Asia muntjul Peking disebelah utara dan Djakarta disebelah selatan !! Dahulu hanja ada 2 centra, sekarang tumbuhlah multi centra daripada politik internasional.

Berkat keagungan Pantjasila, dan dinamis-progressipnja perjuangan Rakjat Indonesia, Revolusi kita laksana burung Radjawali membelah angkasa mengarungi 7 Samudera dan 5 Benua, mendjadi di mertjusuar bagi perjuangan Umat manusia menudju pembentukan daripada satu Dunia yang Baru. Berkat Revolusi kita, dewasa ini menerpati kedudukan yang terhormat dan terpendar dikalangan Rakjat² Asia, Afrika, Amerika Latin serta Negara² Sosialis diseluruh dunia.

Umat manusia meringkuk dalam ketakutan dan kekhawatiran pertumbuhan Dunia dengan bahnih²nja perang-semesta, karena adanja perlombaan persendjataan dan peningkatan kegiatan pertahanan Pakta² nekolim dengan pendirian pangkalan baik militer maupun politik maupun ekonomi diseluruh dunia, mengganggu kehidupan dan ketertaman Rakjat² dan Negara² yang baru merde dan sedang membangun kehidupan nasionalinja.

Konsentrasi² siasat perjuangan ekonomi internasional dalam wujud „Pasar-Bersama” Eropa Barat, Comecon di dunia sosialis Eropa, sistim Commonwealth imperial preferences, memaksa negara² yang sedang dan baru berkembang untuk mempersatukan usaha dan kekuatan ekonominja setjara internasional, guna menang dan menanggulangi komplotan nekolim itu.

Sementara itu, dalam dunia Ilmu pengetahuan Umat manusia telah melahirkan penemuan² baru dalam bidang peluru kendali dan kendaraan luar angkasa, yang menjebabkan petjahnja „Revolusi Luar-Angkasa”.

Chusus dilingkaran Asia-Tenggara dan di Asia Afrika, Umat manusia dihadapkan kepada pergaulan mati²an untuk mengusir nekolim dan tek²nja.

Dalam situasi perkembangan internasional jang demikian itulah, Revolusi Indonesia bergerak-maju mengedjar tudjuannya, mengedjar terwujudnya ketiga kerangka tudjuannya, sebagai pelaksanaan daripada Amanat Penderitaan Rakjat Indonesia dan amanat penderitaan Rakjat diseluruh muka bumi !

Sadarlah hai Rakjatku, sadarlah saudara² para Wakil Rakjat Indonesia, akan tugas-sedjarah jang makin-lama-makin-mendjadi berat ini, tetapi tetap mulia disepandjang masa! Revolusi Indonesia adalah Revolusi *maha besar*, Revolusi Indonesia adalah *bagian* daripada Revolusi Dunia, untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat Ummat manusia. Mari, kita sadari se-dalam²nja, beban-kewadajiban jang diletakkan oleh sedjarah diatas pundak kita-bersama ! Kita harus berani dan mampu menghadapi keharusan untuk memberi isi dan arti kepada Revolusi Ummat Manusia dengan Revolusi Indonesia kita !! Bukan hanja isi dan arti *materiil*, melainkan djuga ISI ETHIS dan MORIL, sebab Revolusi tanpa etika dan moral adalah se-mata² *imitasi*, djiplakan jang hampa, decadensi daripada apa jang kita tjita²-kan bersama. Tanggung-djawab dan beban, hak dan kewadajiban serta priveleges dari Revolusi Indonesia, harus kita pandang sebagai kebahagiaan, sebagai bahagian daripada isi etis dan moral daripada Revolusi Ummat Manusia itu.

Sesungguhnya, sebagai Rakjat jang besar, sebagai Rakjat jang gagah-perkasa, kita terima dengan segala senang hati perubahan zaman dan pertumbuhan internasional dewasa ini, jang meletakkan beban-berat diatas pundak kita. Dan kita berhati-teguh, kita berkejakinan-kuat dan kita bertekad-bulat untuk menggunakan segenap kekuatan dan keberanian jang ada pada kita, guna menanggung beban sedjarah jang berat, tetapi jang sungguh mulia itu! Mari hai Rakjatku, bangkit-serentak ber-sama² memberikan dharma-bhakti kepada Dunia dan Ummat manusia!

Sepuluh tahun jang lalu tatkala Pemimpin² 29 negara Asia dan Afrika berkumpul dan berkonferensi didalam Gedung jang indah, jang bersedjarah ini pada tahun 1955, telah kukatakan bahwa adalah „satu babakan-baru dalam sedjarah Dunia, jang Pemimpin² bangsa² Asia dan Afrika dapat berkumpul dibenuanya sendiri, untuk merundingkan dan mempertimbangkan masalah² kepentingan-bersama mereka!”

Dalam Gedung inilah, Ummat manusia menjaksikan lahirnja **DASASILA BANDUNG**, jang mempunjai akar²nja dalam Pantjasila kita Indonesia.

Saja masih ingat djelas, bagaimana air-muka dan sinar-pandangan mata para Pemimpin² Asia dan Afrika itu, sewaktu saja membeberkan analisa saja tentang „garis-hidup imperialisme” jang membenteng dari selat Djibraltar, menjusur ke Timur melalui Lautan Tengah, Terusan Suez, Lautan Merah, Samudera Indonesia, Selat Sumatera, membelok ke-Lautan Tiongkok Selatan sampai ke-Lautan Djepang. Daratan² sebelah-me-

njebelah dari pada „garis-hidup imperialisme” jang pandjang itu, pada waktu itu sebagian besar masih tanah-djadjahan Rakjatnja tidak merdeka, haridepannja tergadaikan kepada sistim asing.

Sepandjang „garis-hidup imperialisme”, sepandjang „urat-nadi imperialisme” itu, dipompakan „darah kehidupan kolonialisme”, demikian kuuraikan kepada para Pemimpin Asia dan Afrika waktu itu.

Tetapi lihatlah sekarang, perubahannya ! Lihatlah sekarang pengaruh dan daja-dorong daripada Dasasila Bandung itu kepada daratan-daratan disepandjang „garis-hidup imperialisme” itu! Mereka semua telah merdeka; mereka semua telah berdaulat dalam negaranya sendiri², bahkan mereka telah bangkit-berdjjuang menggempur dan menghantjurkan „The life-line of imperialism” itu sendiri !

Itulah rachmat Tuhan kepada Revolusi kita, itulah berkat Revolusi Indonesia bagi Asia-Afrika. Memang sesungguhnya, Revolusi adalah mendjebol dan membangun. Revolusi Indonesia dan Revolusi Asia-Afrika mendjebol imperialisme, kolonialisme, mendjebol neo-kolonialisme, mendjebol kapitalisme, untuk membangun sosialisme, untuk membina Dunia-baru !!

Betapa besar sjukur dan terima-kasih kita kepada Allah S.W.T. atas karunia dan bimbinganNja dalam kita melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat Indonesia dan Rakjat² Asia-Afrika dengan hasil gilang-gemilang itu :

Sekarang kita hendak memperingati Dasawarsanja Konferensi Asia-Afrika Pertama itu !

Pemerintah dan Rakjat Indonesia seluruhnja menjambut peringatan itu dengan segala kegairahan dan kemeriahan jang mungkin dapat kita sadjikan. Kita berbuat demikian, karena kita meniadari, betapa besar, betapa luas, betapa dalam pengaruh Konferensi Bandung itu untuk kebangunan, untuk kebangunan segenap bangsa² di Afrika-Asia, kedua benua jang dulu merupakan tempat berpidjak dan bertjokolnja imperialisme. Dengan kebangkitan Rakjat² Asia-Afrika, mulai gugurlah kedudukan imperialisme. Dunia-baru mulai dirintis menudju pelaksanaannya !

Sediak tahun 1955, semangat Bandung menjala² membakar, me-ngobar²kan perdjjuangan Rakjat² Asia-Afrika jang masih tertindas, terutama sekali dibenua Afrika.

Atas dasar kekuatan Rakjat masing² dan berkat *solidaritas* Negara-negara Asia-Afrika berdasarkan semangat Bandung itulah, banjaklah negara²-merdeka-baru lahir dibenua Afrika, jang kini memperkokoh barisan Rakjat² progressip-revolusioner guna menghantjur-leburkan nekolim.

Untuk menanggapi pertumbuhan internasional jang akan mendjungkir-balikkan tata-susunan dunia-lama itu, maka sudahlah sepantasnja, djika Rakjat Indonesia dengan sungguh meningkatkan gelora badai-tofan Asia-Afrika, guna menjongsong lahirnja dunia baru. Oleh sebab itulah, Pemerintah dan Rakjat Indonesia selalu aktif ikut-serta

dan memelopori penyelenggaraan Konferensi² Asia-Afrika diberbagai bidang, seperti KPAA, KWAA, KIAA, MMAA dan persiapan² untuk KAA ke II di Aldjazair nanti di bulan Djuni. Bahkan lebih daripada itu, kita telah memelopori dan menjelenggarakan GANEFO, guna merintis jalan kearah terselenggaraja CONEFO.

Dengan memperluas hubungan diplomatik dan memperkuat Perwakilan² kita di Afrika dan Amerika-Latin, kita akan lebih mengerti dan dapat lebih intensip membantu kawan² seperjuangan kita itu. Dalam bidang pembangunan, kita akan dihadapkan pada keharusan untuk memberikan BANTUAN TEHNIK DAN EKONOMI kepada negara-negara sahabat kita sesuai dengan permintaan mereka.

Nah, hal ini semua adalah tidak-lain dan tidak-bukan pelaksanaan daripada tugas dan tanggung-djawab Revolusi Indonesia sebagai mertjusuar bagi perjuangjan Rakjat² Asia-Afrika, Ameri-Latin dan Negara-negara Sosialis. Dalam rangka kesadaran inilah, maka Sidang Umum MPRS ini dilangsungkan *sekarang*, karena MPRS adalah alat-utama-Revolusi Indonesia untuk menetapkan garis² besar pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakjat.

Oleh sebab itu, bermusjawarahlah dalam semangat dan kesadaran pertumbuhan Revolusi Indonesia dan Revolusi Dunia, seperti kita alami setjara konkrit sekarang ini! Bermusjawarahlah setjara gesit-tiepat sesuai dengan dinamika dan dialektikanja Revolusi kita!

Itulah sebabnja, Sidang Umum MPRS sekarang ini sifatnja *sangat khusus* dan hanja *bertjara tunggal*, jang tidak-mungkin dan tidak-boleh ditjampuri atau diselundupi oleh atjara² lain !!

Renungkanlah, musjawarahkanlah atjara-tunggal itu dengan masak dan matang se-matang²nja untuk didjadikan Ketetapan seluruh Rakjat Indonesia dalam menghadapi situasi nasional dan internasional sekarang ini dan untuk menjongsong lahirnja Dunia Baru!

Oleh sebab itu, saja berpesan kepada Sidang Umum MPRS ini, hendaknja Madjelis Tertinggi kita ini dapat dan mampu menguraikan semangat dan tekad perjuangjan Revolusi Indonesia sebagai mertjusuar Revolusi Dunia!

6. TUGAS POLITIK DAN TUGAS EKONOMI.

Mengikuti perkembangan Revolusi kita baik di-bidang nasional maupun internasional, Negara dan Rakjat kita dihadapkan pada Tugas-politik sesuai dengan meningkatnja situasi-revolusioner dewasa ini dalam melawan musuh² Revolusi dari luar dan dari dalam. Tugas politik jang sangat mendesak sekarang ini adalah :

- 1). Mensukseskan Konfrontasi politik, militer, ekonomi, sosial dan kebudayaan terhadap projek neo-kolonialisme Inggris „Malaysia”, dan imperialisme² lainnja;

- 2). Merealisasi kerdjasama antara negara² the New Emerging Forces, jang telah dirintis dan digalang oleh KAA I, GANEFO, MMAA, KPAA, KWAA, KIAA dan persiapan² untuk mengadakan Konferensi AA ke-II, guna menudju ke CONEFO. Untuk keperluan itu, maka akan dibangunlah POLITICAL VENUES untuk tempat terselenggaraja CONEFO tersebut.

- 3). Melandjutkan perjuangjan akibat keluarnja Indonesia dari PBB.

Sebagai akibat daripada keluarnja Indonesia dari PBB, dan meningkatnja perjuangjan pengganjanjan projek-nekolim „Malaysia”, maka sungguh bertambah beratlah tugas Revolusi Indonesia dalam membina Dunia Baru melalui poros the New Emerging Forces. Oleh sebab itu, seluruh Rakjat Indonesia dimanapun ia berada, harus siap-siaga menghadapi a s p e k²-b a r u di-bidang politik dan ekonomi internasional dengan tindakan² tegas untuk mentiptakan iklim-politik dan iklim-ekonomi berlandaskan Maninol-Tavip dan Dekon dalam wujud satu PROGRAM PERDJUANGAN jang tepat. jang bertudjuan :

- 1). Mensukseskan perjuangjan Dwikora;

- 2). Merealisasi kesanggupan dan kemampuan Revolusi Indonesia sebagai mertjusuar dalam pembentukan Dunia-Baru melalui poros Nefos; dan

- 3). Mempersiapkan Bangsa Indonesia setjara mental dan fisik untuk dengan ichlas memikul tanggung-djawab dalam melaksanakan Kerangka Ketiga tudjuan Revolusi-Besar kita.

Sesungguhjnalah, dalam kita melaksanakan DWIKORA, Negara dan Rakjat kita tidak sadja dihadapkan pada tugas-politik jang sungguh besar, tetapi djuga sekaligus harus melaksanakan TUGAS-EKONOMI sebagai salah satu sjarat penting untuk mensukseskan Tugas-Politik kita itu.

III. EKONOMI.

7. SITUASI PEMBANGUNAN.

Saudara², meneliti perkembangan situasi Negara dan masyarakat pada tingkatan perkembangan Revolusi kita dewasa ini, nampak dengan djelas bahwa *perentjanaan* pembangunan seperti terkandung dalam Pola Pembangunan kita, *suka dapat di anggap sesuai dengan keadaan*. Perkembangan moneter-ekonomi dan politik dewasa ini mengharuskan kita untuk melakukan *penjesuaian* jang radikal terhadap kepada komposisi serta pemikiran-pemikiran Pola Pembangunan tersebut, demi suksesnja pelaksanaan program pembangunan kita itu. Kelemahan² dalam tata-susunan projek² dan tata-pemikiran serta kebidaksanaan pembiajaannja, perlu segera *disesuaikan* dengan keadaan jang njata dar ada, guna meningkatkan hasil pelaksanaannja. Seperti telah dua kali diadjukan oleh Pimpinan MPRS dalam Memorandumnja tahun 1963 dan 1964, maka perlu kiranja diambil langkah² past

Untuk merumuskan penyesuaian Pola Pembangunan tersebut.

Berlandaskan Tavip, maka MPRS dan seluruh Rakyat kita harus berani dan sanggup meneliti segala usaha dan Ketetapan²nja, guna senantiasa disesuaikan pelaksanaannya dengan tuntutan perkembangan Revolusi dewasa ini. Setjara khusus MPRS dengan seluruh Rakyat kita harus segera meneliti RENTJANA dan PROGRAM PEMBANGUNAN kita seperti terkandung dalam Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960.

Apakah Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana dalam bentuknja jang sekarang itu tidak sudah ketinggalan dengan perkembangan dan peningkatan Revolusi pada masa ini? Apakah sekarang tidak sudah tiba waktunya bagi kita untuk „membanting stir” didalam bidang-perentjanaan Pembangunan Nasional Semesta itu?

Untuk lebih memenuhi tuntutan dan aspirasi perjuangannya Revolusi kita, saja mengusulkan agar MPRS „MENINDJAU KEMBALI DAN MENJESUAIKAN POLA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENTJANA DENGAN TUNTUTAN PERKEMBANGAN REVOLUSI KITA sekarang ini”.

Sekarang ternjata, bahwa Pola Pembangunan jang garis² besarnya Saudara² telah sjahkan dahulu menjadi tidak-tepat lagi, tidak-tjotjok-lagi dengan tuntutan zaman dan perkembangan Revolusi kita pada tingkatan sekarang. Oleh sebab itu marilah kita „banting stir”, „banting stir” demi sukses dan djajanja pembangunan kita itu sendiri!

Namun demikian, merubah dan menyesuaikan Pola pembangunan dengan tingkatan perkembangan Revolusi kita sekarang tidaklah se-kali² berarti merubah meninggalkan „Kepribadian kita sendiri”! Kita boleh merubah dan kita boleh menyesuaikan perhitungan angka²nja, kita boleh merubah, kita boleh menyesuaikan tata peraturan proyek²nja, kita boleh merubah, kita boleh menyesuaikan pemikiran pembiaiaannya, tetapi satu hal adalah pasti, bahwa kita tidak boleh merubah dan memodulir „Kepribadian kita sendiri” !! Dengan perobahan dan penyesuaian jang bagaimanapun wujud dan rupanya, Pola Pembangunan kita itu harus tetap „Pola Pembangunan Masyarakat Adil dan Makmur seperti diamanatkan oleh penderitaan Rakyat”, Pola Pembangunan berdasarkan Amanat Pembangunan Presiden, iaitu: POLA PEMBANGUNAN BERDASARKAN PANTJASILA! karena Pantjasila itulah Kepribadian kita sebagai Bangsa!

3. BERDIRI DIATAS KAKI SENDIRI.

Sudah kukatakan dalam TAVIP, bahwa MMAA-I, sebagai pengemban daripada Konferensi Bandung, telah merumuskan dengan baik KEHARTIHAN setiap Negara Asia-Afrika, untuk BERDIRI DIATAS KAKI SENDIRI dalam Ekonomi, bebas dalam Politik dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Telah djuga saja kemukakan, apa jang dikatakan oleh Sahabat dan Teman-seperjuangan kita: Kawan Perdana Menteri KIM IL SUNG — jang sekarang duduk disamping saja ini — dalam tahun 1947: „In order to build a democratic state, the foundation of an independent economy of the nation must be established Without the foundation of an independent economy, we can neither attain independence, nor found the state, nor subsist”.

Artinja :

„Untuk membangun satu Negara jang demokratis, maka satu ekonomi jang merdeka harus dibangun. Tanpa ekonomi jang merdeka, tak mungkin kita mentjapai kemerdekaan, tak mungkin kita mendirikan Negara, tak mungkin kita tetap hidup”. Nah, inilah kata daripada kawan kita Perdana Menteri Kim Il Sung.

Sekarang Korea-nja Kawan Kim Il Sung sudah sepenuhnya memetjahkan masalah sandang-pangan. Tadi malam saja katakan bahwa Produksi padinja sadja 400 kg. lebih per kapita pertahun dan dari negara agraris-industriil, sekarang Korea sudah menjadi negara industri-agraris! Inilah kondisinya, maka Korea itu setjara politik maupun kebudajaan, tidak tergantung kepada siapapun.

Indonesia bagaimana? Kita harus mendjawab: „Indonesia tak mau berdiri dibelakang! Indonesia mau berdiri dibarisan depan dalam merealisasikan azas MMAA-II itu!”, karena Revolusi Indonesia adalah mertjusuar bagi Revolusi Ummat Manusia !!

Dewasa ini, dihadapkanlah kepada kita tuntutan² tugas-ekonomi jang mendesak, seperti :

1. Mensukseskan projek² Nation dan Character Building;
2. Memetjahkan masalah sandang-pangan setjepat mungkin;
3. Melandjutkan projek² jang setengah-djadi, atau jang bersifat ekonomis jang sangat penting dalam strategi perjuangannya kita;
4. Mengatasi dan menjingkirkan hambatan² pembangunan jang kita hadapi, dengan menggali dan mendorong kekuatan manusia dan alam Indonesia, untuk lebih banjak lagi menemukan dan memproduksi barang² baru;
5. Menjelesaikan masalah modal-asing jang sudah ada di Indonesia, hingga kita mentjapai kebebasan penuh dibidang ekonomi.

Menghadapi tugas-ekonomi ini, musuh² Revolusi kita diluar dan didalam negeri selalu memfitnah dan mengedjek bahwa Indonesia akan „collapse dibidang ekonomi, collapse”. Tetapi apa njatannya? Fitnahan dan otjehan itu adalah chajalan belaka dan impian dihari siang jang bolong! Indonesia tidak-bisa dan tidak-mungkin ambruk karena kesulitan ekonomi, selama Rakyatnja berdjuga memeras-keringat dan membanting-tulang, untuk mengolah kekajaan-alam Indonesia jang berlimpah-limpah ini.

Lebih² dalam tingkatan pertumbuhan Revolusi kita dewasa ini, dimana kepentingan-ekonomi ne-

gara² asing di Indonesia telah kita tundukkan pada kebidjaksanaan dan hukum² nasional kita, hingga mereka makin lama makin terdesak posisinya menudju likwidasinya total jang dapat kita djadikan *t a m b a h a n* kekajaan materiil kepada milik Indonesia sendiri.

Adalah keharusan objektip untuk segera men-tjiptakan *i k l i m e k o n o m i* jang baik, seperti telah saja tegaskan dalam TAVIP. Oleh sebab itu, kita harus segera bangkit-serentak meng-ganjang kesulitan² dan *h a m b a t a n² p e m b a n g u n a n* dibidang Produksi, Distribusi, Keuangan-pembiajaan, dan Organisasi pelaksanaannya.

Kita perlu, sekali lagi kukatakan, kita perlu segera *b a n t i n g s t i r²*, baik dalam perentjanaan maupun dalam pelaksanaannya. Dalam pada itu, kita harus benar² berdiri teguh dan berpegang erat² pada prinsip „Berdiri diatas kaki sendiri”, „Pertjaja pada kekuatan sendiri”. Hal ini tidak-bisa-lain daripada keharusan untuk mendjadikan kekuatan-kekuatan ekonomi kita jang *r i i l - n j a t a* sebagai *l a n d a s a n - u t a m a* dalam men-tjiptakan iklim-ekonomi jang kita perlukan. Iklim ekonomi jang kita perlukan itu harus sungguh² sesuai dengan kebutuhan *p e r d j u a n g a n* kita untuk memperkuat ketahanan Revolusi menghadapi antjaman dan kepungan nekolim serta antek²-nja, untuk merehabilitasi semua alat² produksi jang ada, untuk memberantas inflasi dan korupsi, serta mengusahakan stabilisasi harga, dan meningkatkan daja-beli Rakjat, dan untuk meletakkan dasar² kuat guna perentjanaan pembangunan berikutnya.

Dalam kita „membanting stir” itu, harus selalu diinsjafi, bahwa karena kekuatan² ekonomi jang riil-njata harus kita djadikan sandaran-utama untuk realisasi prinsip „Berdiri diatas kaki sendiri”, maka kekuatan-kekuatan ekonomi jang riil-njata itu harus di INVENTARISASI dengan tjer-mat, dengan tertib, selagi harus ditjegah kemerosotannya, dan selalu dinaikkan kapasitas-kerdjajnja sedjauh mungkin dengan menetapkan : „KEBIDJAKSANAAN EKONOMI PERDJU-ANGAN”.

9. EKONOMI PERDJUANGAN

Djika kita meneliti pembangunan selama 4 tahun pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional kita, maka pengalaman menundjukkan, bahwa Pola Pembangunan tersebut belum *berperanan* dengan memuaskan dalam perkembangan ekonomi kita, karena sudah terlalu banjak kegiatan ekonomi dan pembangunan di Pusat dan Daerah berada *d i l u a r* Pola Pembangunan tersebut.

Sumber² pembiajaan jang ditetapkan didalam Pola Pembangunan dengan sistim projek B, jang sebagian besar menggantungkan diri pada kerdjaja sama dengan modal asing setjara konvensional adalah tidak sesuai dengan prinsip „Berdiri diatas kaki sendiri” dibidang ekonomi.

Dalam kenjataannya, konsepsi projek B itu telah *tidak sesuai* dengan perkiraan pemikirannya semula.

Djuga perhitungan biayanya tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi ekonomi-moneter kita, jang tidak dapat direntjanakan setjara pasti, karena adanya inflasi serta kenaikan harga dan tarif-tidak-resmi jang terus-menerus.

Mengingat perkembangan Revolusi kita dalam mensukseskan DWIKORA, maka dalam memperkuat ketahanan Revolusi, kita harus djuga segera mengatasi kesulitan² ekonomi seperti diperintahkan oleh DEKON. Pada tingkatan perkembangan Revolusi pembangunan sekarang ini, kita harus melakukan „banting stir” dengan menetapkan : PROGRAM EKONOMI PERDJUANGAN.

Program tersebut harus kita dasarkan pada Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, untuk men-tjiptakan sjarat² jang diperlukan dalam meneruskan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana, jang harus *d i s e s u a i k a n* dengan tuntutan² Deklarasi Ekonomi (DEKON) dan TAVIP serta tingkatan perkembangan Revolusi Indonesia.

Dalam memikirkan „Program Ekonomi Perdjuangan” itu, saja mendapat banjak bahan dari hasil Sidang Paripurna Muppenas ke-II jang baru lalu. Banjak data² jang dapat diobah lebih landjut untuk mengisi Program Ekonomi Perdjuangan itu.

Satu hal jang selalu menggangu pikiran saja ialah adanya *k e s i m p a n g - s i u r a n* dalam pelaksanaan Pembangunan, karena adanya ber-matjam² djenis Pola jang tidak diintegrasikan. Oleh sebab itu, dengan ini saja tegaskan, *semua djenis Pola pembangunan jang ada sekarang ini, harus segera disatukan!* Kita harus hanja mengenal : SA-TU Pola Pembangunan sadja!

Pola Pembangunan Nasional Projek² Mandataris, Pola Pembangunan Daerah, Kopedasan, Irian Barat, Kooperasi serta Swasta harus *disatukan harus diintegrasikan* dan harus *disinkronisasikan*. Tidak boleh lagi ada pola jang berdiri sendiri diluar **POLA KESATUAN PEMBANGUNAN itu !!**

Dalam merentjanakan dan melaksanakan Pembangunan itu, hendaknya lebih daripada jang sudah² ditjuraikan perhatian dan kekuatan untuk menyelesaikan terlebih dahulu PROJEK² PRASARANA (projek² infrastruktur), karena djustru prasarana itulah *harus lebih dahulu ada*, sebelum kita dapat melaksanakan projek jang kita kehendaki. Kurang perhatian terhadap kepada projek prasarana menundjukkan tidak adanya *penglihatan kedepan*. Kurang memperhatikan prasarana, sama dengan membangun *tanpa rentjana !!*

Oleh sebab itu, untuk mensukseskan pembangunan Ekonomi kita, dan untuk mensukseskan „Program Ekonomi Perdjuangan” kita, prasarana jang fundamental adalah **PEMBANGUNAN MENTAL RAKJAT** kita dalam rangka *National Character-building*, termasuk didalamnj Program Indoktrinasi jang harus diintensipkan agar kita-semua betul² tahu dan mengerti dengan

djelas dan terang, apa jang harus kita kerdjakan Kalau tidak demikian, orang akan mudah menjeleweng, menjeleweng dari relnja Ekonomi Terpimpin, menjeleweng kearah praktek Ekonomi-liberal jang djustru harus kita berantas habis²an sampai ke-akar²nja.

Dalam hubungan dengan menegakkan dan menanamkan dalam² pengertian dan kesadaran Ekonomi Terpimpin pada djiwa dan hati Rakjat dan Pemimpin²nja, telah kuambil ketegasan² dalam beberapa masalah.

Pemerintah dan seluruh Rakjat kita harus benar² memeras otak dan membanting tulang untuk menggali dan mengolah kekajaan alam Indonesia jang ber-limpah² itu, dengan segera menghasilkan penemuan² dan pembuatan barang² baru.

Pernah kutjeritakan tjontoh dari Koreanja Kawan Kim Il Sung, dimana Rakjatnja telah sanggup membuat badju misalnja dari batu-lahar. Ketika saja berkundjung ke-Korea, saja mendapat hadiah dari Kawan Kim Il Sung badju jang indah, jang sungguh menggerakkan hati saja untuk mendorong dan mengoprak-oprak Rakjat kita jang penuh dengan daja-kreasi itu, agar segera bangkit-bangun mengolah kekajaan-alam-Indonesia jang ber-limpah² ini mendjadi barang² jang kita perlukan sendiri dan jang dapat kita sumbangkan kepada Dunia. Badju indah jang oleh kawan Kim Il Sung diberikan kepada saja itu terbuat dari batu, Saudara². Batu digodog, digempur, digodog, dibentuk, digoreng, tidak tahu saja.

Mendjadi serat, serat ditenun mendjadi kain, kain dipotong mendjadi badju, dikasihkan kepada Bung Karno, dan sampai sekarang aku simpan dirumah sebagai satu tanda ketjintaan saja kepada kawan Kim Il Sung.

Maka dalam hubungan ini, telah saja instruksikan kepada Menteri Research Nasional untuk menjelenggarakan setjara besar²an PAMERAN DARI SEMUA HASIL PENEMUAN KITA dalam menjongsong Hari Kemerdekaan kita jang akan datang. Disana Rakjat akan melihat, bahwa dari kulit-katjang jang kita buang-buang, dapat dibikin hardboard. Dari tulang-tulang jang berantakan kita buang-buang tak berketentuan, dapat dibikin lim-kaju, flour tapal-gigi, makanan ternak, dan gips. Dari bunga-bunga kita jang banjak djenis dan djumlahnja itu dapat kita bikin minjak-wangi. Dalam bidang perobatan, akan dapat dilihat betapa banjak matjam dan betapa banjak djenis obat-obatan sadja jang dapat kita buat sendiri. Dalam bidang kimia, banjak penemuan-penemuan kita sendiri dapat kita djadikan barang-barang produksi baru.

Sesungguh²njalah, Saudara², Tuhan Seru-Semesta-Alam mengaruniai kita Tanah-air dan alam Indonesia jang kaja-roya, jang segera harus kita olah mendjadi barang-barang pakai untuk kita sendiri dan seluruh ummat manusia. Djika Rak-

jat kita dan para Pemimpin²nja bersungguh-sungguh mengembangkan daja-kreasinja, pastilah kita tidak akan kekurangan barang keperluan, pasti kita tidak perlu import barang-keperluan sehari-hari, bahkan kita akan dapat mengexport barang-barang keperluan itu, hingga terlaksanalah prinsip „Berdiri diatas kaki sendiri” dalam Ekonomi!

Hendaknja Saudara-saudara sekalian menumpahkan segala perhatian dan segala daja-upaja untuk menggerakkan Rakjat kita seluruhnja melaksanakan Program Perdjuangan Ekonomi ini, dengan mengerahkan segala kekuatan dan sarana jang ada pada kita.

Mengenai masaalah EXPORT-IMPORT, telah saja gariskan dengan tegas, bahwa export kita harus segera diperbesar, sebaliknya import kita harus dikendalikan sampai kepada barang-barang jang betul-betul tidak dapat kita produser didalam negeri sendiri. Dalam hubungan ini, telah saja ambil ketetapan, bahwa import hanja akan dilakukan oleh Pemerintah sadja.

Para pengusaha swasta dilarang untuk melakukan import, ketjuali djika mereka mengimport atas nama Pemerintah. Kepada Swasta² itu hanja diberikan idzin untuk berusaha mendjadi PRODUSEN-EXPORTIR, jang exportnja harus dilakukan dibawah pimpinan Pemerintah. Demikianlah tugas-Revolusi jang dibebankan kepada para pengusaha swasta sebagai salah satu unsur-mutlak dalam susunan Ekonomi Sosialis Indonesia. Swasta harus mengerahkan segala dana dan tenaga, untuk meningkatkan export kita ini. Dan, kepada Bamunas dan Departemen Penertiban Bank dan Modal Swasta, dikomandokan untuk menjesuaikan kebidjaksanaan dan aktivitasnja dengan garis-strategi serta taktik Program Perdjuangan kita itu.

Mengenai Kooperasi, telah saja komandokan untuk „membanting sir” pula dengan meng-reorganisasi diri kedalam dua lapangan usaha sadja, jaitu: lapangan PRODUKSI dan lapangan DISTRIBUTIBUSI.

Telah kuperingatkan, agar Kooperasi itu djangan hanja tenggelam dalam soal-soal materiil sadja, tetapi harus sungguh-sungguh mendjadi tempat-persemaian dari rasa-kesosialan, rasa-kemasjarakatan, rasa-bahwa-manusia-itu tidak dapat-berdiri-sendiri, tetapi hanja merupakan suatu unsur sadja dalam keseluruhannja. Kooperasi harus melaksanakan tugas-Revolusi membuat manusia Indonesia benar-benar mendjadi INSAN-MASJARAKAT, bukan insan-individual-liberalis, bukan insan-rimba, dan bukan insan-gua! Kooperasi harus njata-njata mendjadi alat jang penting, mendjadi wahana (vehicle), mendjadi kendaraan kearah Sosialisme Indonesia.

Mengenai Transmigrasi, telah saja gariskan kebidjaksanaan Transmigrasi gaja-baru, jang harus segera dilaksanakan setjara revolusioner dan konsekwen.

Selanjutnja, supaya penjesuaian Pola Pembangunan, chususnja Program Ekonomi Perdjuangan kita, betul² didasarkan kepada DEKON, dalam mana telah diletakkan garis-garis strategidasar dan garis-kebidjaksanaan djangka-pendek pembangunan Ekonomi kita.

Mengenai **Pembajaan** Pembangunan, segera harus ditetapkan kebidjaksanaannja, jang terutama harus didasarkan atas kekuatan dan kemampuan jang kita miliki sendiri. Sumber-sumber pembiajaan berupa usaha-usaha unit ekonomi: Negara, Kooperasi dan Swasta serta kekuatan Rakjat pekerdja, Buruh, Tani dan Angkatan Bersendjata kita, harus betul-betul dimanfaatkan seefficient-efficientnja. Disamping mendjadikan Pertanian, Perkebunan dan Pertambangan sumber utama bagi Pembiajaan Pembangunan, maka perlu digali dan ditjiptakan sumber-sumber pendapatan baru, seperti projek-projek jang segera dapat menghasilkan.

Untuk meningkatkan export kita sebagai sumber pembiajaan devisa, sungguh mutlak-perlu untuk peningkatan **keachlian** tenaga-pekerdja dan **upgrading** daripada barang-barang export kita. Baik untuk keperluan produksinja sendiri maupun untuk keperluan export itu, maka segera harus dilakukan rehabilitasi alat-alat produksinja, berbarengan dengan rehabilitasi prasarana jang vital, seperti transport di darat, transport laut dan transport udara.

Perusahaan Negara harus betul-betul merupakan sumber Pembiajaan Pembangunan. Oleh sebab itu, harus segera diadakan tindakan-tindakan tegas terhadap kepada salah-urus dan penjahgunaan-wewenang, disamping meninggikan managerial knowhow, managerial skill daripada Pemimpinnja dan integrasi antara Pimpinan dan Pekerdjanya, serta tata-kerdja atas prinsip cost-accounting. Achirnja, Itakjat seluruhnja harus memberikan **sumbangan** dengan njata, dengan membajar pajak serta sumbangan-sumbangan lain setjara disiplin!

Dalam menggali sumber-sumber Pembiajaan Pembangunan, supaya diberikan wewenang sepenuhnya djuga kepada Daerah, seperti wewenang untuk mengeluarkan obligasi, undian dan sebagainya. Namun demikian, harus ditetapkan bahwa **KESATUAN DAN KEPENTINGAN NASIONAL** dalam bidang Ekonomi dan Keuangan, harus dipegang teguh oleh Pemerintah Pusat dengan sistim pengawasannja jang efektif.

Melihat perkembangan moneter dewasa ini, kita harus segera memerangi inflasi melalui perentjanaan perkembangan harga, produksi dan distribusi. Untuk keperluan itu, perlu adanja satu aparat jang berwenang dalam soal perentjanaan dan pengawasan pelaksanaannja.

Oleh sebab itu, **ANGGARAN BELANDJA PEMBANGUNAN** harus dikuasai langsung oleh Presiden/Mandataris MPRS.

Dalam hubungan ini, hendaknja ditinjau kembali dan ditetapkan setjara pasti kedudukan dan fungsi serta komposisi **BANK PEMBANGUNAN INDONESIA**, agar dapat mendjadi aparat jang efektif dalam mengumpulkan modal-pembangunan dan mengendalikan penggunaan pembiajaan pembangunan itu setjara menjeluruh. Setjara tegas dan njata harus dilaksanakan **penghematan** dalam penggunaan keuangan Negara, terutama pada objek-objek jang non-produktip. Prosedur penjaluran pembiajaan Pembangunan harus disederhanakan dan dipermudah dengan mensjaratkan pertanggungan-djawab jang lantjar dari para pelaksana projek.

Kemudian, **KERDJASAMA DENGAN LUAR-NEGERI** harus digunakan untuk memperkuat produksi kita sendiri, dan mempertinggi dajatipta Rakjat. Pembelian-pembelian dari luar-negeri, baik tuna maupun dengan kredit, harus mentjiptakan surplus dalam produksi kita, jang harus mentjiptakan surplus-export jang tjukup bagi pembiajaan.

Rentjana-rentjana Pembangunan, berikut Rentjana-rentjana pembangunan ekonomi jang bagaimanapun baiknja, tidak mungkin dapat direalisasi dalam praktek, djika **APARATUR PELAKSANAAN**-nja tidak mampu, dan management ekonominja tidak diatur dan tidak didjalankan setjara efficient. Oleh sebab itu, kita harus segera mengambil tindakan-tindakan perbaikan dibidang organisasi dan personalia berikut per-sjaratan mentalnja.

Dibidang organisasi pelaksanaan-pembangunan itu, diperlukan adanja pemetjahan jang efektif mengenai aparat penentuan policy pelaksanaannja jang memusat dan berentjana, dan aparat-penjelenggaraan serta aparat-pengawasannya di Pusat dan di Daerah. Pemerintah Daerah harus dipertanggung-djawabkan atas pelaksanaan dan pengawasan Pola Pembangunan Daerah dan ditugaskan mengkoordinir semua projek-projek jang dilaksanakan dalam Daerahnja itu. Oleh sebab itu, sekarang para Gubernur/Kepala Daerah didudukkan dalam MPRS dan MUPPENAS untuk melaksanakan integrasi dan koordinasi itu dengan njata.

Untuk mensukseskan pelaksanaan, **Pimpinan-tunggal** harus dipegang langsung oleh Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS. Dan untuk melaksanakan **EKONOMI TERPIMPIN** kita setjara konsekwen dan mentjegah kesimpang-siuran wewenang dalam kebidjaksanaan ekonomi, harus dibentuk **DEWAN PIMPINAN EKONOMI NASIONAL** (Economic Directing Board), jang dipimpin langsung oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 40 TAHUN 1965 TERTANGGAL 10 PEBRUARI 1965
tentang : PENINGTEGRASIAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA :

MENIMBANG :

- a. bahwa berhubung dengan perkembangan politik negara dan taraf perjuangannya bangsa Indonesia maka kebidjaksanaan pokok ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kebidjaksanaan umum Revolusi Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka berdiri diatas kaki sendiri, maka kebidjaksanaan politik perdagangan luar negeri serta pelaksanaannya perlu diintegrasikan dengan politik luar negeri sehingga tertjapai suatu landasan yang kuat bagi perkembangan potensi negara sesuai dengan sifat ekonomi terpimpin menudju ke Sosialisme Indonesia.

MENINGGAT :

1. Pasal 4 ayat 1 U.U.D.
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II Tahun 1960;
3. Deklarasi Ekonomi tanggal 28 Maret 1963.

MENDENGAR :

Presidium Kabinet.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Pertama :

Seluruh urusan Perdagangan Luar Negeri yang berada dibawah kekuasaan Menteri Perdagangan dipindahkan dibawah kekuasaan Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri.

Kedua :

Alat perlengkapan impor dan ekspor ditempatkan setjara fungsionil dan organisatoris dibawah kekuasaan Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri.

(Sambungan hal. 14)

BERDIKARI.....

IV. PENUTUP

10 USUL MANDATARIS MPRS

Nah, Saudara-saudara sekalian, dan seluruh Rakjat Indonesia dimanapun berada.

Demikianlah Amanat Politik Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dan Mandataris MPRS pada tingkatan pertumbuhan Revolusi kita yang mahabesar sekarang ini.

Dengan resmi, saja, Presiden/Mandataris MPRS mengusulkan kepada Sidang Umum MPRS ini, untuk menelaah dan memusjawarakan Amanat Politik saja ini.

Ambillah keputusan, dan tetapkanlah pendirian-teguh dan tekad-bulat Rakjat Indonesia dalam menghadapi perkembangan politik dan ekonomi nasional dan internasional dewasa ini, agar menjadi djelas-teranglah obor-api-Revolusi Indo-

Ketiga :

Dengan dipindahkannya urusan perdagangan luar negeri itu, maka Kompartimen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri dinamakan: **KOMPARTIMEN LUAR NEGERI/HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI.**

Keempat :

Pelaksanaan pemindahan urusan perdagangan luar negeri ditugaskan kepada Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Menteri Perdagangan.

Kelima :

Segala surat² keputusan, penetapan², peraturan² dsb.-nya yang bertentangan dengan surat Keputusan Presiden ini, dengan ini ditjabut.

Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Surat Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara R.I.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 Pebruari 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUKARNO

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 10 Pebruari 1965

SEKRETARIS NEGARA

ttd

MOHD. ICHSAN.

nesia sebagai mertjusuar dalam perjuangan dan pergulatan Umat-manusia menudju kepada pembentukan Dunia-baru melalui poros The New Emerging Forces.

Betapa besar dan berat pertanggungan-djawab Revolusi Indonesia kepada Umat manusia, Saudara! Tetapi, betapa luhur dan mulia tugas-sedarah yang dipikulkan diatas pundak Rakjat Indonesia kita ini!

Berbesar-hatilah Rakjatku!

Bertekad-teguhlah Rakjat Indonesia jang gagah-perkasa!

Hanja Bangsa jang besar dapat dan mampu mengemban dan melaksanakan IDEE jang BESAR!

Hajo berdiri-tegak! Madju-terus!

Madju-terus, pantang mundur!!

Tuhan-Seru-Semesta-Alam Insja Allah beserta kita!! Terimakasih.

SURAT KEPUTUSAN
MENKO KOMPARTIMEN LUAR NEGERI/HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI
DAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

NO. : 001/3/MPLN/SK/65. Tgl. 15 Maret 1965.

**MENKO KOMPARTIMEN LUAR NEGERI/
HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI DAN
PERDAGANGAN LUAR NEGERI.**

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam menjelenggarakan Pemerintahan Negara menurut Undang² Dasar telah ditetapkan Peraturan tentang susunan dan tugas Departemen Perdagangan dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 15 September 1964 No. 281/M/SK/64 sebagai mendahului Surat Keputusan Presiden;
2. Bahwa dengan dipindahkannya wewenang Urusan Perdagangan Luar Negeri kepada Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri perlu menetapkan Organisasi dan Susunan Urusan Perdagangan Luar Negeri;

MENGINGAT :

1. Keputusan Presiden No. 40 tahun 1965 tertanggal 10 Pebruari 1965 tentang pengintegrasian Perdagangan Luar Negeri;
2. Surat Keputusan Bersama Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri dan Menteri Perdagangan No. 006/3/MPLN dan MP//SKB/65 tanggal 16 Maret 1965 tentang Follow-up Keputusan Presiden R.I.

MENDENGAR :

Menteri Perdagangan dan Kuasa/Deputy Menteri Perdagangan Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Dengan mendahului Keputusan Presiden tentang Organisasi dan Susunan dari Urusan Perdagangan Luar Negeri dari Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri;

MENETAPKAN :

ORGANISASI DAN SUSUNAN URUSAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI dari Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri sebagai berikut :

BAB I

UMUM.

Pasal 1

PENGERTIAN

- Jang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dengan
- a. Urusan Perdagangan Luar Negeri adalah semua aparatur dan segala kegiatan jang berhubungan dengan Perdagangan Luar Negeri.
 - b. Menteri adalah Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.
 - c. Kuasa/Deputy Menteri adalah pedjabat jang diserahi wewenang penuh oleh Menteri, melaksanakan tugas Menteri dan bertindak atas nama Menteri.

Pasal 2

KEDUDUKAN

Urusan Perdagangan Luar Negeri merupakan bagian dari Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri

Pasal 3

TUGAS POKOK

Menentukan kebidjaksanaan² umum, mengatur dan mengawasi pelaksanaan dalam bidang Urusan Perdagangan Luar Negeri.

BAB II

ORGANISASI DAN SUSUNAN
(Lihat BAGAN pada halaman 18).

Pasal 4

1. Menteri/Kuasa Menteri.
2. Pembantu Utama (disingkat P.U.).
3. Staf Pribadi (disingkat Staf Prib.).
4. Direktorat Ekspor (disingkat DEK).
5. Direktorat Impor (disingkat DIM).
6. Direktorat Hubungan Perdagangan Luar Negeri (disingkat DHPLN).
7. Direktorat Marketing dan Research (disingkat DIMAR).
8. Sekretariat Umum (disingkat SEKUM).

FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 5

1. Menteri/Kuasa Menteri memimpin, mengatur dan mengawasi serta bertanggung jawab atas kelanjutan kegiatan Urusan Perdagangan Luar Negeri, baik didalam maupun diluar negeri.
2. Pembantu Utama membantu Menteri/Kuasa Menteri dalam memimpin, mengatur dan mengawasi kelanjutan kegiatan intern (kedalam) dari Urusan Perdagangan Luar Negeri.
3. Staf Pribadi membantu Menteri/Kuasa Menteri dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

Kegiatan² antara lain :

Melaksanakan pekerjaan dan tugas² khusus yang diberikan oleh Menteri/Kuasa Menteri.

Pasal 6

4. Direktorat Ekspor mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebidjaksanaan dibidang Ekspor.

Kegiatan² antara lain :

- a. Mengumpulkan dan menjiapkan bahan² untuk perentjanaaan kebidjaksanaan dibidang Ekspor.
- b. Mengawasi pelaksanaan dari peraturan² yang berlaku dibidang Ekspor.
- c. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemberian izin² Ekspor.
- d. Menetapkan harga barang² Ekspor untuk pelaksanaan politik marketing yang khusus.
- e. Mengikuti perkembangan dan pembentukan harga dari barang² Ekspor dan mempeladjar bahan² baik dari dalam maupun dari luar negeri yang berhubungan dengan perdagangan Ekspor.
- f. Menjusun dan memelihara dokumentasi perdagangan Ekspor.
- g. Ikut serta merentjanakan prognose Ekspor dari prognose neratja perdagangan.
- h. Menjelenggarakan usaha² lainnja dengan tujuan untuk memperkembangkan hasil-hasil Ekspor diluar negeri.

Pasal 7

Direktorat Impor mengatur dan mengawasi kelanjutan pelaksanaan kebidjaksanaan dibidang Impor.

Kegiatan² antara lain :

- a. Mengumpulkan dan menjiapkan bahan² untuk perentjanaaan kebidjaksanaan dibidang Impor.
- b. Mengawasi pelaksanaan dari peraturan² yang berlaku dibidang Impor.
- c. Mengatur dan mengawasi pelaksanaannya pemberian izin² Impor.
- d. Mengikuti perkembangan harga barang² Impor.
- e. Menjusun dan memelihara dokumentasi perdagangan Impor.
- f. Ikut serta merentjanakan prognose Impor dari prognose neratja Perdagangan.

Direktorat Hubungan Perdagangan Luar Negeri mengatur dan mengawasi kelanjutan pelaksanaan kebidjaksanaan dibidang Hubungan Perdagangan Luar Negeri.

Kegiatan² antara lain :

- a. Menjiapkan perdjandjian perdagangan dengan luar negeri.
- b. Mengikuti, mengawasi dan mengusahakan kelanjutan pelaksanaan perdjandjian² perdagangan dengan luar negeri.
- c. Mengkoordinir dan mengawasi perwakilan² perdagangan diluar negeri.
- d. Turut serta dalam perundingan² baik didalam maupun diluar negeri.
- e. Mengumpulkan dan mempeladjar bahan² tentang perdagangan luar negeri.
- f. Menjusun dan memelihara dokumentasi tentang perdagangan luar negeri.
- g. Mengikuti perkembangan dari neratja perdagangan dan neratja pembajaran.

Pasal 9

Direktorat Marketing dan Research mengadakan marketing research dan merumuskan kebidjaksanaan marketing serta memperkembangkan usaha perdagangan luar dan dalam negeri.

Kegiatan² antara lain :

- a. Mengadakan marketing survey dan marketing research baik dalam maupun diluar negeri.
- b. Menetapkan marketing policy yang setepat-tepatnja untuk tiap² commodity.
- c. Menjelenggarakan suatu „international trade information service”.
- d. Menjelenggarakan usaha² baik didalam maupun diluar negeri untuk memperkembangkan perdagangan internasional.
- e. Merumuskan suatu pola ekspor dan pola impor, baik yang berupa penetapan target untuk jangka pendek maupun dalam bentuk planning/programming untuk jangka waktu pandjang dalam rangka kebidjaksanaan umum pola pembangunan ekonomi Nasional.
- f. Turut mengusahakan adanya pola kanalisasi barang² untuk ekspor dan pola distribusi yang berupa peredaran dan penjaluran kekonsumen didalam negeri.

Pasal 10

Sekretariat Umum mengatur dan mengawasi segala persoalan Urusan Perdagangan Luar Negeri.

Kegiatan² antara lain :

- a. Mengurus hal² kepegawaian.
- b. Mengurus hal² anggaran belandja dari pada Urusan Perdagangan Luar Negeri.
- c. Mengurus hal² yang bertalian dengan gedung², peralatan², rumah-tangga Urusan Perdagangan Luar Negeri, pengangkutan dan perdjalan dinas para pegawai.

- d. Melaksanakan pekerjaan administrasi dalam arti sempit (surat-menjurat).
- e. Mengurus kesedjahteraan para pegawai jang antara lain meliputi usaha² dibidang :
 1. Koperasi pegawai.
 2. Kesehatan.
 3. Rekreasi.
 4. Distribusi.
 5. Peristirahatan.
 6. Djaminan sosial lainnja.
- f. Merentjanakan dan menjelenggarakan tambahan pendidikan/latihan bagi para pegawai.
- g. Tugas lainnja dalam bidang administrasi jang ditetapkan oleh Menteri/Kuasa Menteri dan Pembantu Utama.

BAB IV

PERWAKILAN-PERWAKILAN URUSAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Pasal 11

1. Menteri/Kuasa Menteri membentuk/mendirikan :
 - a. Perwakilan Urusan Perdagangan Luar Negeri ditiap-tiap Ibu-kota Daerah Tingkat I.
 - b. Direktorat Ekspor Tjabang dipelabuhan² penting diwilajah Indonesia.
 - c. Perwakilan² Urusan Perdagangan Luar Negeri dipusat² perdagangan Internasional.
2. Organisasi dan wewenang dari Perwakilan²/tjabang² tersebut dalam ayat (1) pasal 6 ditetapkan oleh Menteri/Kuasa Menteri.

Peraturan Baru mengenai Surat Pendorong Produksi (S.P.P.) akan dimuat dalam nomor jang akan datang.

BAB V

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN/PENUTUP

Pasal 12

Selama pemisahan setjara fisik dari Departemen Perdagangan kepada Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri belum dilaksanakan, maka hal² jang masih mendjadi wewenang Direktorat Administrasi Pusat Departemen Perdagangan, tetap berlaku dan diatur oleh Direktorat Administrasi Pusat seperti biasa.

Pasal 13

Tata-kerdja dari Urusan Perdagangan Luar Negeri akan ditetapkan lebih landjut oleh Kuasa/Deputy Menteri.

Pasal 14

Hal² jang belum tjukup atau belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih landjut oleh Kuasa/Deputy Menteri.

Pasal 15

1. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja dan berlaku surut sampai tanggal diserahkannja wewenang Urusan Perdagangan Luar Negeri kepada Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.
2. Agar semua orang mengetahuinja, mengundang Surat Keputusan ini dengan menempatkanja dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**MENKO KOMPARTIMEN LUAR NEGERI
HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI DAN
PERDAGANGAN LUAR NEGERI.**

ttt.

(DR. SOEBANDRIO)

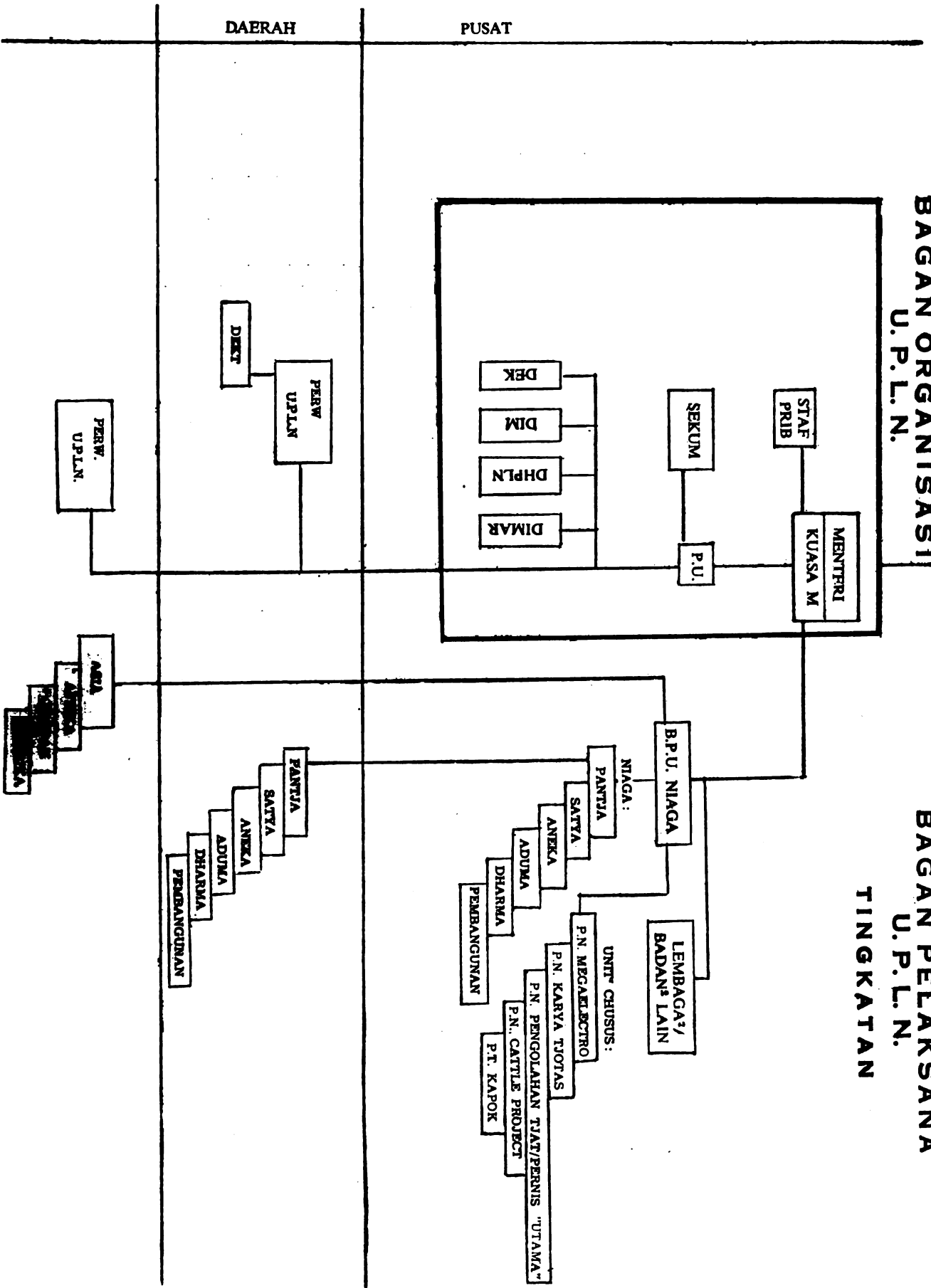
TINGKATAN

DAERAH

PUSAT

BAGAN ORGANISASI
U.P.L.N.

BAGAN PELAKSANA
U.P.L.N.
TINGKATAN



SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

No. 001/MPDN/SK/65, tgl. 9-4-1965

tentang

Organisasi dan Susunan Departemen Perdagangan Dalam Negeri

MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI,

MENIMBANG :

1. bahwa dalam menjelenggarakan Pemerintah Negara menurut Undang-Undang Dasar, telah ditetapkan Susunan dan Tugas Departemen Perdagangan dengan surat keputusan Menteri Perdagangan tanggal 15 September 1964 No. 281/M/SK/64 serta tambahan/perubahannya, sebagai mendahului surat keputusan Presiden;
2. bahwa dengan dipindahkannya wewenang Urusan Perdagangan Luar Negeri kepada Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri, perlu menetapkan Organisasi dan Susunan baru Departemen Perdagangan Dalam Negeri;

MENINGAT :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 4 ayat (1);
- b. Peraturan Presiden No. 4 tahun 1962 (disempurnakan) tentang pokok-pokok Organisasi Aparatur Pemerintah Negara pada tingkat tertinggi;
- c. Peraturan Presiden No. 5 tahun 1962 (disempurnakan) tentang Pedoman kerdja administratif (Peraturan Tata-tertib) aparatur pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi;
- d. Peraturan Presiden No. 1 tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 4 dan No. 5 tahun 1962 (disempurnakan) masing-masing tentang pokok-pokok organisasi dan pedoman kerdja administratif (Peraturan Tata-tertib) aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi;
- e. Keputusan Presiden No. 40 tahun 1965 tentang Pengintegrasian Perdagangan Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Dengan menjabut surat keputusan Menteri Perdagangan tanggal 15 September 1964 No. 281/M/SK/64 serta tambahan/perubahannya dan dengan mendahului keputusan Presiden tentang Organisasi dan Susunan Departemen Perdagangan Dalam Negeri.

MENETAPKAN :

ORGANISASI DAN SUSUNAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI sebagai berikut :

BAB I

UMUM

Pasal 1

PENGERTIAN

Jang dimaksud dalam surat keputusan ini dengan :

1. Departemen adalah Departemen Perdagangan Dalam Negeri.
2. Menteri adalah Menteri Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 2

TUGAS POKOK

Menentukan kebidjaksanaan² umum, mengatur dan mengawasi pelaksanaan dalam bidang Perdagangan Dalam Negeri.

BAB II

ORGANISASI DAN SUSUNAN

(lihat BAGAN terlampir)

Pasal 3

Departemen Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari :

1. Menteri;
2. Pembantu Utama (disingkat P.U.);
3. Staf Pribadi (disingkat Staf Prib.);
4. Direktorat Pengadaan dan Penjaluran (disingkat DIPEN);
5. Direktorat Harga (disingkat DIH);
6. Direktorat Metrologi (disingkat DIMET);
7. Direktorat Administrasi (disingkat DIAD);
8. Sekretariat Umum (disingkat SEKUM);

BAB III

FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 4

1. *Menteri* memimpin, mengatur dan mengawasi serta bertanggung-djawab atas kelantjaran kegiatan-kegiatan Departemen.
2. *Pembantu Utama* membantu Menteri dalam memimpin, mengatur dan mengawasi serta bertanggung-djawab atas kelantjaran kegiatan intern (kedalam) dari Departemen.

Pasal 5

STAF PRIBADI melaksanakan tugas-tugas khusus jang ditetapkan oleh Menteri.

Kegiatan-kegiatannya antara lain :

- a. mengurus protokol dan hubungan masyarakat;
- b. mengerdjakan pekerdjaan tata-usaha untuk Menteri;
- c. mengurus rapat-rapat dan pertemuan lain dari Menteri;
- d. mengumpulkan dan menjiapkan bahan-bahan jang diperlukan oleh Menteri;
- e. menjelenggarakan tugas-tugas Departemen jang berhubungan dengan lembaga-lembaga kenegaraan (M.P.R.S., D.P.R.-G.R., Front Nasional D.P.A. dan sebagainya);
- f. membantu Menteri dalam melantjarkan hubungan dengan Departemen-Departemen, organi-

sasi-organisasi dan panitia-panitia yang bersifat antar Departemen;

- g. mengikuti perkembangan panitia-panitia intern Departemen dan panitia-panitia antar Departemen dimana Departemen ikut serta;
- h. menjiatkan peraturan-peraturan dan mengurus soal-soal yang ada hubungannya dengan hukum;
- i. atas kuasa Menteri mewakili Departemen atau badan-badan dalam lingkungannya dalam bidang hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan, yang tidak diserahkan kepada pengatjara Negara setjara khusus.

Pasal 6

DIREKTORAT PENGADAAN DAN PENJALURAN mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebidjaksanaan dibidang pengadaan barang-barang agar perlengkapan akan barang-barang yang dibutuhkan untuk penghidupan rakyat, Pemerintah dan pembangunan, baik yang diimpor maupun yang dibuat/dihasilkan didalam negeri, dapat dipenuhi serta merata diseluruh Indonesia, serta aparat-aparat pelaksanaannya.

Kegiatan-kegiatanja antara lain :

- a. mengatur dan mengawasi kelantjaran pelaksanaan kebidjaksanaan dibidang pengadaan dan penjaluran barang-barang;
- b. mengatur dan mengawasi peredaran barang-barang antar Daerah Tingkat I;
- c. dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin :
 - 1) membina badan-badan usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan dalam negeri,
 - 2) mengatur dan mengawasi kanalisasi barang-barang ekspor ke aparat-aparat ekspor,
 - 3) mengatur dan mengawasi kelantjaran penjaluran barang-barang kekonsumen.

Pasal 7

DIREKTORAT HARGA mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebidjaksanaan dibidang harga dan tarip.

Kegiatan-kegiatanja antara lain :

- a. mengikuti dan mempeladjar perkembangan-perkembangan dan fakta² yang mempengaruhi pembentukan harga;
- b. mengatur pelaksanaan kebidjaksanaan Pemerintah tentang harga, antara lain :
 - 1) harga dari barang-barang dan djasa-djasa tertentu,
 - 2) mengesahkan harga-pokok suatu barang atau djasa tertentu.
- c. mengadakan dan memelihara tjatatan tentang keuntungan lebih (meerwinst) dalam bentuk apapun djuga berdasarkan pemeriksaan buku.

Pasal 8

DIREKTORAT METROLOGI mengatur dan mengawasi kelantjaran pelaksanaan kebidjaksanaan dibidang metrologi.

Kegiatan-kegiatanja antara lain :

- a. mengadakan penjelidikan dilapangan tehnik mengukur atas dasar ilmu metrologi;

- b. menera dan mengulang-tera alat² timbangan dan ukuran/takaran, chususnja, yang dipakai untuk keperluan perdagangan;
- c. mengawasi agar alat² termaksud pada sub b ajat ini mempunjai tanda tera yang sjah;
- d. membina Lembaga Ukur;
- e. membina sworn-weigers yang dapat diakui setjara internasional;
- f. mengusahakan certificate of weight untuk barang-barang ekspor;
- g. mengadakan hubungan dengan badan-badan internasional yang ada hubungannya dengan metrologi.

Pasal 9

DIREKTORAT ADMINISTRASI mengatur dan mengawasi segala persoalan administrasi Departemen.

Kegiatan-kegiatanja antara lain :

- a. mengurus hal-hal kepegawaian seluruh Departemen;
- b. mengurus hal-hal Anggaran Belandja Departemen, Tata Usaha, Keuangan, Penjimpanan, pengeluaran dan penerimaan uang, pembukuan masuk-keluarnya uang, tanggung-djawab keuangan beserta hal lain-lain dalam bidang keuangan;
- c. mengurus hal-hal yang bertalian dengan gedung-gedung dan rumah-tangga Departemen, peralatan, pengangkutan dan perdjalananan-dinas para pegawainja;
- d. mengatur dan menjelenggarakan pendidikan/latihan bagi para pegawai Departemen dan mengadakan usul-usul tentang pendidikan latihan pada lembaga² pendidikan atau badan-badan lain, baik didalam maupun diluar negeri;

Pasal 10

SEKRETARIAT UMUM bertugas mengerdjakan administrasi Departemen dalam arti sempit dan mengurus kesedjahteraan pegawai.

Kegiatan-kegiatanja antara lain :

- a. melaksanakan pekerdjaan tik, arsip dan ekspedisi;
- b. mengurus kesedjahteraan para pegawai Departemen yang meliputi usaha-usaha dibidang :
 - 1) Koperasi;
 - 2) Peristirahatan;
 - 3) Rekreasi;
 - 4) Distribusi bahan-haban kebutuhan pokok dan bahan-bahan keperluan lainnja;
 - 5) Pengobatan;
 - 6) Djaminan-djamanan sosial lainnja;

BAB IV

PERWAKILAN-PERWAKILAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Pasal 11

- 1. Menteri membentuk/mendirikan :
 - a. Perwakilan Departemen ditiap-tiap Ibu kota Daerah Tingkat I;

- b. Tjabang-tjabang Direktorat tertentu di Ibu-kota Daerah Tingkat II dan/atau dikota-kota dimana dianggap perlu;
2. Organisasi dan wewenang dari Perwakilan-perwakilan/Tjabang-tjabang tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Menteri.

BAB V
KETENTUAN-KETENTUAN
PERALIHAN/PENUTUP

Pasal 12

1. Direktorat-Direktorat, Biro-Biro dan Kantor-Kantor dalam lingkungan Departemen jang sebelumnja surat keputusan ini ada, tetapi dalam surat keputusan ini tidak disebut, dibebaskan dari segala tugas-tugasnja.
2. Pembubaran badan-badan termaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih landjut.

Pasal 13

Tata-kerdja Departemen akan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri.

Pasal 14

Hal-hal jang belum tjukup atau belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri.

Pasal 15

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Agar semua orang mengetahui, mengundang Surat Keputusan ini dengan menempatkannja dalam Berita Negara Republik Indonesia.

MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI,
t.t.d.

A. JUSUF

(Brig. Djendral T.N.I.)

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

No. 002/MPDN/SK/65 - tanggal 9-4-1965

MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI.

MENIMBANG :

1. Bahwa dengan telah dikeluarkannja Kep. Pres. 40/1965, dianggap perlu untuk merubah tjara pelaksanaan reorganisasi dari Perusahaan Dagang Negara mendjadi Perusahaan Niaga Negara;
2. Bahwa berhubung dengan hal tersebut, perlu mentjabut Surat² Keputusan Komando Pelaksanaan Pembubaran — Pengawasan — Pengurusan — Reorganisasi Rasionalisasi — Spesialisasi Perusahaan² Dagang Negara No. 002/SK/KOM/64, No. 002A/SK/KOM/64 jo No. 007/SK/KOM/64 dan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 06/M/SK/65.

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1964;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 40 tahun 1965;
3. Surat² Keputusan Komando Pelaksanaan Pembubaran — Pengawasan — Pengurusan — Reorganisasi Rasionalisasi — Spesialisasi Perusahaan² Dagang Negara No. 002/SK/KOM/64 No. 002A/SK/KOM/64 dan No. 007/SK/KOM/64;
4. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 06/M/SK/65.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERTAMA :

M e n t j a b u t :

- a. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 06/M/SK/65.
- b. Surat² Keputusan Komando Pelaksanaan Pembubaran — Pengawasan — Pengurusan —

Reorganisasi Rasionalisasi — Spesialisasi Perusahaan² Dagang Negara No. 002/SK/KOM/64, No. 002A/SK/KOM/64 jo. No. 007/SK/KOM/64;

KEDUA :

Reorganisasi Perusahaan² Dagang Negara mendjadi Perusahaan² Niaga Negara sebagai berikut :

1. Bekas² PN. ANEKA BHAKTI dan PN. SEDJATI BHAKTI bersama² mendjadi PN. ANEKA NIAGA;
2. Bekas² PN. BUDI BHAKTI dan PN. MARGA BHAKTI bersama² mendjadi PN. ADUMA NIAGA;
3. Bekas² PN. TRI BHAKTI mendjadi PN. PANTJA NIAGA;
4. Bekas PN. FADJAR BHAKTI mendjadi PN. SATYA NIAGA;
5. Bekas² PN. TULUS BHAKTI dan PN. DJAYA BHAKTI bersama mendjadi PN. PEMBANGUNAN NIAGA;
6. Bekas PN. SINAR BHAKTI mendjadi PN. DHARMA NIAGA.

KETIGA :

Apabila ternjata terdapat kekeliruan, Surat Keputusan ini dapat diubah/ditambah.

KEEMPAT :

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

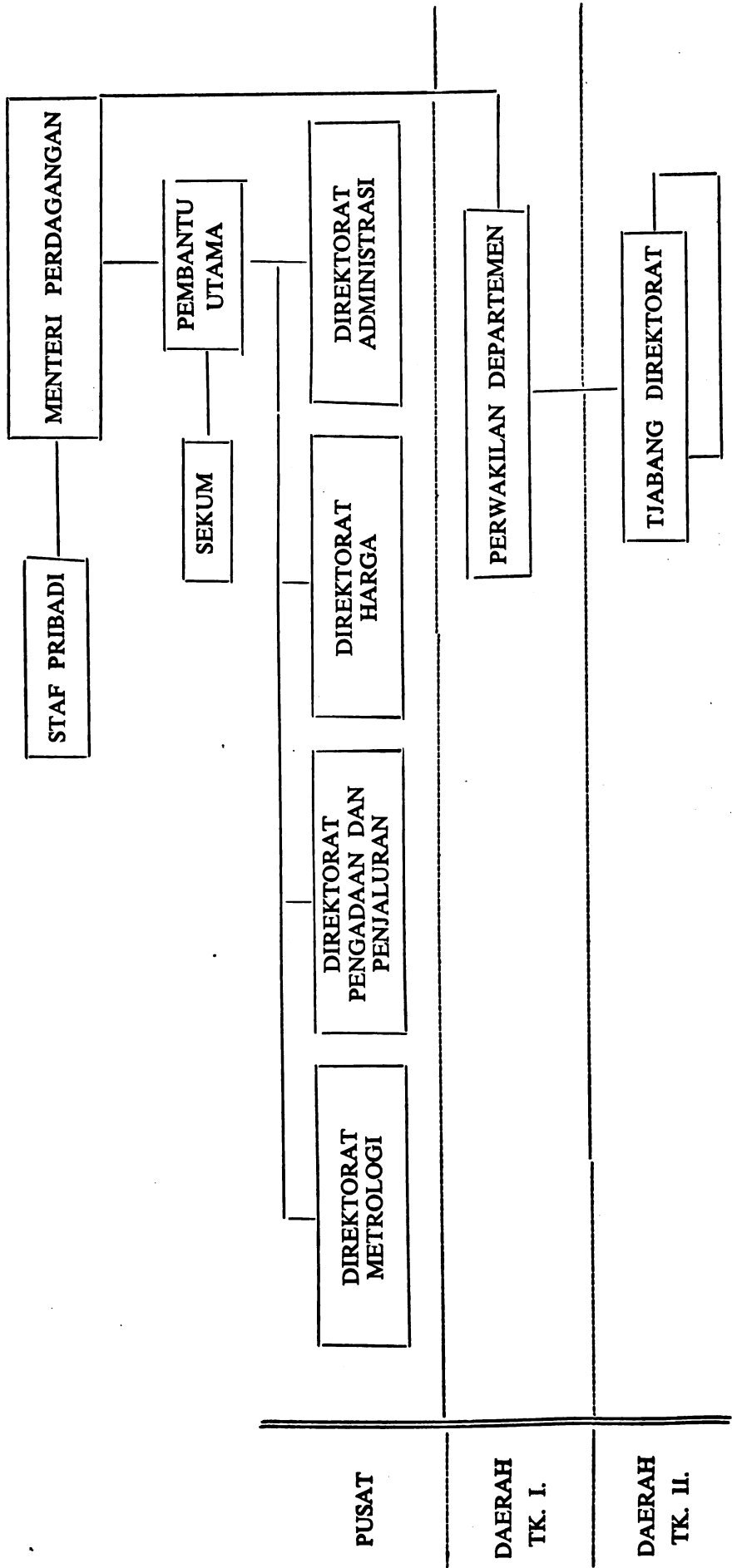
Pada tgl. : 9 April 1965.

MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI,
t.t.d.

A. JUSUF

(Brig. Djendral T.N.I.)

BAGAN ORGANISASI DAN SUSUNAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI.



PUSAT

DAERAH
TK. I.

DAERAH
TK. II.

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

No. : 030/MPDN/SK/65.
027/4/MPLN/SK/65., tgl. 26-4-1965.

MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

MENIMBANG :

Bahwa dalam rangka menudju kearah dekonstrasi, perlu membentuk Perwakilan Departemen Perdagangan Dalam dan Luar Negeri di tiap-tiap Ibu-Kota Daerah Tingkat I;

MENINGAT :

1. Surat Keputusan Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri No. 001/3/MPLN/SK/65 tanggal 15 Maret 1965 ;
2. Surat Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri No. 001/MPDN/SK/65 tanggal 9 April 1965 ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

Pertama :

Membentuk Perwakilan Departemen Perdagangan Dalam Negeri dan Urusan Perdagangan Luar Negeri di tiap-tiap Ibu-Kota daerah tingkat I;

Kedua :

Susunan-Organisasi Perwakilan tersebut pada pertama (Lihat Bagian Terlampir) terdiri :

1. Kepala Perwakilan.
2. Kepala Bagian Perdagangan Dalam Negeri.
3. Kepala Bagian Perdagangan Luar Negeri.
4. Sekretariat Umum.
5. Kepala Seksi Ekspor.
6. Kepala Seksi Marketing & Research.
7. Kepala Seksi Impor.
8. Kepala Seksi Harga.
9. Kepala Seksi Metrologie.
10. Kepala Seksi Pengadaan & Penjaluran.

Ketiga :

Perwakilan tersebut pada mewakili Departemen Perdagangan Dalam Negeri dan Urusan Perdagangan Luar Negeri dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebidjaksanaan teknis dibidang perdagangan dalam dan luar negeri ;

Keempat :

1. Kepala Perwakilan memimpin, mengatur, mengawasi dan bertanggung-djawab kepada Menteri Perdagangan atas kelantjaran kegiatan Kantor Perwakilan tersebut pada ajat ketiga ;
2. Kepala Bagian Perdagangan Luar Negeri mengkoordinir dan mengawasi serta bertanggung-djawab kepada Kepala Perwakilan atas kelantjaran/kegiatan² dari Seksi² Ekspor, Marketing dan Research dan Impor;

3. Kepala Bagian Perdagangan Dalam Negeri mengkoordinir dan mengawasi serta bertanggung-djawab kepada Kepala Perwakilan atas kelantjaran kegiatan² dari Seksi² Harga, Metrologie dan Pengadaan dan Penjaluran ;
4. Sekretariat Umum mengatur kelantjaran dan menjelesaikan persoalan administrasi Perwakilan ;
5. Kepala Seksi Ekspor mengatur dan mengawasi kelantjaran pelaksanaan kebidjaksanaan teknis dibidang ekspor jang didjalankan oleh Tjabang Direktorat Ekspor ;
6. Kepala Seksi Marketing & Research merumuskan :
 - a. pola ekspor dan impor untuk Daerah Tingkat I jang bersangkutan.
 - b. pola kanalisasi barang² ekspor dan pola penjaluran.
7. Kepala Seksi Impor mengatur dan mengawasi kelantjaran kebidjaksanaan teknis dibidang impor untuk Daerah Tingkat I jang bersangkutan.
8. Kepala Seksi Harga mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebidjaksanaan teknis dibidang harga untuk Daerah Tingkat I jang bersangkutan ;
9. Kepala Seksi Metrologie melaksanakan kegiatan² metrologie untuk Daerah Tingkat I jang bersangkutan ;
10. Kepala Seksi Pengadaan & Penjaluran mengatur terpenuhinja pengadaan barang² jang dibutuhkan untuk/penghidupan rakjat, Pemerintah dan pembangunan, baik jang diimpor maupun jang berasal dari hasil produksi dalam negeri untuk Daerah Tingkat I jang bersangkutan dan teraturnja penjaluran ;

Kelima :

Dengan dibentuknja Perwakilan tersebut di atas kantor² Inspeksi Harga, Perdagangan Dalam Negeri, Metrologie, Direktorat Ekspor Tjabang WAPIN di Ibu Kota Daerah Tingkat I dilebur kedalam Perwakilan ;

Keenam :

Hal² jang belum tjukup/belum diatur dalam surat Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut ;

Ketujuh :

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di : D j a k a r t a.

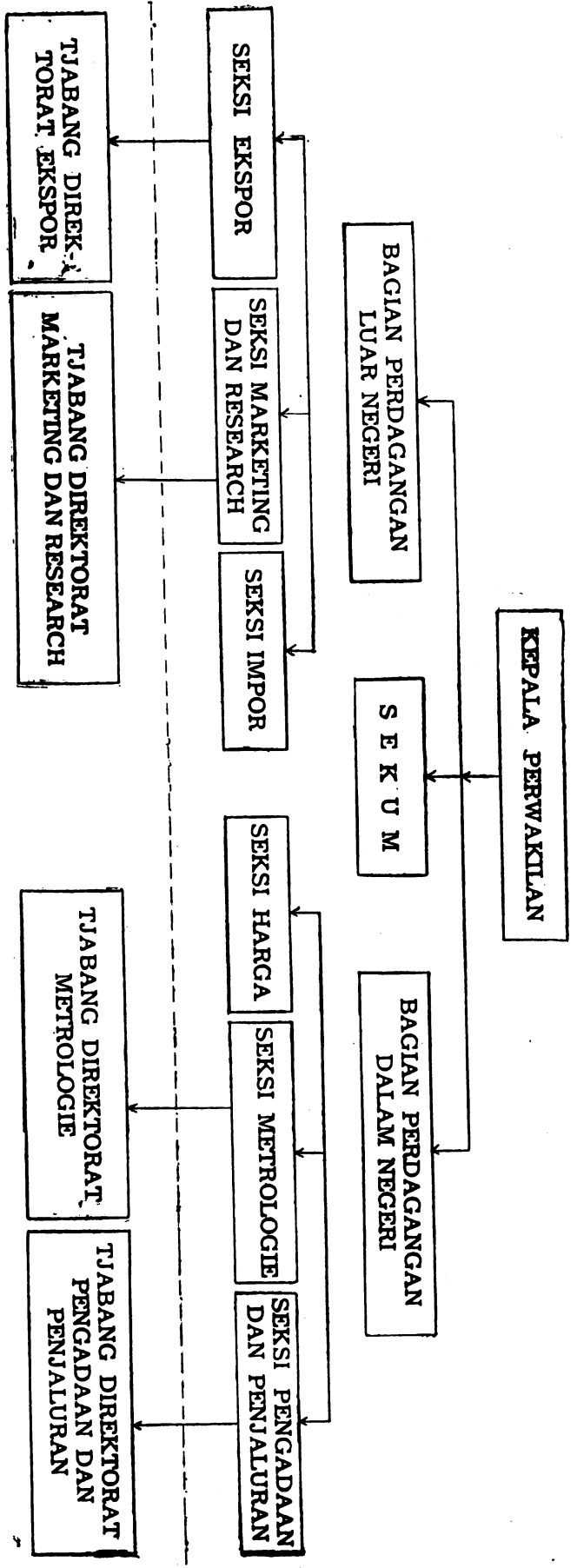
Pada tanggal : 26 April 1965

MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

ttd.

A. YUSUF

(Brig. Djendral T.N.I.)



Lampiran Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri dan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri.

030/MPDN/SKB/65.

No. : 027/4/MPLN/SKB/65

TANGGAL, 26 April 1965.

SURAT KEPUTUSAN MENKO LUAR NEGERI/H.E.L.N. DAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI
No. 005/3/MPLN/SK/65 tgl. 15-3-1965.

MENKO LUAR NEGERI/HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

MENIMBANG :

- a. Bahwa sesuai Surat Keputusan Presiden R.I. No. 40 th. 1965 seluruh urusan perdagangan luar negeri jang berada dibawah kekuasaan Menteri Perdagangan dipindahkan dibawah kekuasaan Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri;
- b. bahwa berhubung ad (a) diatas dan demi kelanjutan tugas² dibidang perdagangan luar negeri, perlu segera menentukan status semua Perwakilan Perusahaan Niaga Negara jang ada diluar negeri;
- c. Bahwa semua Perwakilan Perusahaan Niaga Negara diluar negeri dalam menjalankan tugasnja, setjara organisatoris administratif dan taktis perlu langsung dibawah pimpinan Presiden Direktur B.P.U. — Niaga;

MENGINGAT :

1. Undang² No. 19 tahun 1960.
2. Keputusan Presiden R.I. No. 40 tahun 1965.
3. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1961.
4. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1964.
5. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 264/M/SK/64, tanggal 7 September 1964.
6. Surat Keputusan Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri No. 004/3/MPLN/SK/65 tgl. 15 Maret 1965.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Pertama :

Dalam menjalankan tugasnja semua Perwakilan Perusahaan Niaga Negara jang ada diluar negeri setjara organisatoris, administratif dan taktis berada langsung dibawah pimpinan Presiden Direktur B.P.U. — Niaga;

Kedua :

Semua iniatief dan tindakan² jang menjimpang dari pedoman kewadajiban² tugas Perwakilan² Perusahaan Niaga diluar negeri sebagai tertjan²um dalam pedoman tentang pembentukan Perwakilan²/Tj²abang² Dagang diluar negeri, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Presiden Direktur B.P.U. — Niaga;

Ketiga :

Mutasi² (pengangkatan/pemindahan) dari para Managing Director jang ada diluar negeri sepenuhnya berada langsung ditangan Presiden Direktur B.P.U. — Niaga atas nama Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri atas pres²asi kerdja;

Keempat :

Dalam menjalankan tugasnja para Managing Director Perwakilan Perusahaan Niaga Negara diluar negeri bertanggung djawab pada Presiden Direktur B.P.U. — Niaga;

Kelima :

Bila dikemudian hari ternjata terdapat kesalahan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perobahan seperlunja;

Keenam :

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MENKO LUAR NEGERI/HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI.

u.b.

KUASA MENTERI URUSAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

ttd.

A. JUSUF

(Brig. Djendral T.N.I.)



KEY PERSONNEL DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN URUSAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jang Mulia Menteri Perdagangan/Kuasa Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri Brig. Djendral A. Jusuf elah menetapkan/menunjuk key personnel dalam lingkungan Departemen Perdagangan Dalam Negeri/ dan Urusan Perdagangan Luar Negeri dari Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri sebagai berikut :

I. Urusan Perdagangan Luar Negeri.

Nama :	Djabatan :
1. Soediro M.A.	— Pembantu Utama Kuasa Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri.
2. Ir. J.J. Pitoy M.A.	— Kep. Direktorat Marketing dan Research.
3. R.H. Tuwaidan M.A.	— Kep. Direktorat Impor.
4. Alamsjah St. Bandaro Pandjang.	— Kep. Direktorat Ekspor.
5. R.M. Tjokrosantoso	— Kep. Direktorat Hubungan Perdagangan Luar Negeri.
6. Drs. A. Aidit	— Kep. Staf Pribadi.
7. Sahidatul Muljo SH	— Kep. Sekretariat Umum.

II. Departemen Perdagangan Dalam Negeri.

Nama :	Djabatan :
1. Prof. Dr. Arifin Abdulrachman	— Pembantu Utama Menteri Perdagangan Dalam Negeri.
2. Drs. Sjaaf Mochtar	— Kep. Direktorat Pengadaan dan Penjaluran.
3. Drs. Ibrahim	— Kep. Direktorat Harga.
4. Soehardjo	— Kep. Direktorat Metrologie.
5. Budhiman B.A.	— Kep. Direktorat Administrasi.
6. Soenarjono B.A.	— Kep. Sekretariat Umum.
7. Soeprapto Ranoeatmodjo	— Kep. Staf Pribadi Menteri.

III. BPU-NIAGA.

Nama :	Djabatan :
1. Kol. Inf. Usman Ismail	— Presiden Direktur BPU-Niaga.
2. Sumardi Mangunkusumo SH.	— Direktur
3. M.J. Prajogo.	— Direktur.
4. Drs. Soediarso	— Direktur.

IV. P.N. Niaga.

Nama :	Djabatan :
1. Kom. Bes. Amir Dt. Palindih SH.	— Pd. Pres. Direktur P.N. ADUMA NIAGA.
2. Maj. Djukardi Odang SH.	— Pd. Pres. Direktur P.N. ANEKA NIAGA.
3. Let. Kol. Abu Sadikin	— Pd. Pres. Direktur P.N. DARMA NIAGA.
4. Teuku Moh. Daud	— Pd. Pres. Direktur P.N. PANTJA NIAGA.
5. Soekadrie Surjoatmodjo	— Pd. Pres. Direktur P.N. PEMBANGUNAN NIAGA.
6. J.B. Titihuru	— Pd. Pres. Direktur P.N. SATYA NIAGA.

V. Pusat Komando Sukarelawan Departemen Perdagangan.

1. Panglima Sukarelawan	— Menteri Perdagangan Brig. Djen. A. Jusuf.
2. Wk. Panglima Sukarelawan	— Kol. Inf. Soebroto Warjosoedjono.
3. Kep. Staf Sukarelawan	— Major Inf. Harjono.

INSTRUKSI

No. 008/3/MPLN/I/65.

DITUDJUKAN KEPADA :

SEMUA PENGUSAHA EKSPOR DISELURUH INDONESIA

1. Dalam amanatnya baru² ini, Jang Mulia Wakil Perdana Menteri I/Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri Dr. Soebandrio telah menetapkan suatu target ekspor Pemerintah US. \$. 600.— djuta tanpa hasil minjak bumi.
2. Agar target tersebut dapat ditjapai, diharapkan kepada semua pengusaha ekspor, baik Perusahaan Negara, Badan² Usaha Koperasi maupun pengusaha Swasta untuk bekerdja dengan sekuat tenaga dan dengan segala kemampuan jang ada pada perusahaan masing².
3. Segala daja mampu dan potensi jang tersedia harus dikerahkan baik dengan kerdja sama para produsen/penghasil barang² ekspor maupun dengan djalan menggali sendiri sumber² didaerah masing² untuk meningkatkan volume ekspor.
4. Hasil² jang diekspor bukan terbatas kepada barang² jang biasa diperdagangkan keluar negeri, tetapi djuga hasil² jang sudah lama ditinggalkan dan barang² jang masih perlu ditjari pemasarannya harus mendapat perhatian.
5. Seluruh perusahaan pengolahan dan up-grading harus digerakkan dan diintensipkan penggunaannya untuk mentjari mutu sebagaimana diminta oleh negara² konsumen.
6. Segala fasilitas baik dari Pemerintah setempat maupun dari badan² lainnya harus dipergunakan sebaik-baiknya jang memungkinkan suatu drive dengan hasil jang berlipat ganda.
7. Kesulitan² jang didjumpai harus diusahakan bersama-sama dengan instansi² Pemerintah setempat dan badan² lainnya agar supaya diatasi sendiri sesuai dengan prinsip „Berdiri diatas kaki sendiri” dan berdasarkan dekonstraksi sebagai unsur ekonomi terpinpin.
8. Perdagangan ekspor jang mendjadi tulang punggung bagi penyelesaian Revolusi Indonesia harus dilaksanakan oleh semua eksportir Indonesia, selaku Alat Revolusi jang sadar akan tugas dan kewajibannya.
9. Kami akan memberikan bimbingan dan petunjuk² dalam menjertai mensukseskan usaha seluruh para eksportir Indonesia.
10. Usaha export-drive ini harus mendapat prioritas pertama dalam segala kegiatan pengusaha ekspor Indonesia dan mendjadi Tugas Besar Nasional jang dihadapi dengan penuh ketekunan diatas segala pengorbanan.

Semoga usaha kita bersama diridhoi oleh Tuhan Jang Maha Kuasa.

DJAKARTA, 22 Maret 1965.

**KUASA MENTERI URUSAN
PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

t.t.d.

(A. J U S U F)

Brig. Djen. T.N.I.

P.J.M. PRESIDEN SUKARNO :

”..... Maka oleh karena itu, Saudara², didalam ilmu perdjjuangan selalu boleh dikatakan, engkau tidak bisa berdjjuang benar djikalau engkau tidak hakkul yakin, merasakan kebenaran daripada perdjjuangan itu. Oleh karena itu maka selalu kuandjurkan kepada Rakjat Indonesia kukatakan kepada Rakjat Indonesia, kugemblengkan kepada Rakjat Indonesia hakkul yakin, hakkul yakin bahwa kita berdiri diatas djalan jang benar, hakkul yakin bahwa tudjuan daripada perdjjoangan kita itu akan berhasil”.

Penerbitan Chusus no. 348, hal. 14.

KEPUTUSAN KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI
No. 010/3/MPLN/SK/65, Tahun 1965.

tentang

TARGET EKSPOR TAHUN 1965

**KUASA MENTERI PERDAGANGAN
 LUAR NEGERI**

MENIMBANG :

bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip berdiri diatas kaki sendiri dan pelaksanaan dekonsentrasi dalam rangka Ekonomi Terpimpin, perlu menetapkan target ekspor 1965 dan pengamanan pelaksanaannya;

MENINGGAT :

1. Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia No. Aa/B/44/65 Tahun 1965;
2. Keputusan Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri No. 009/3/MPLN/SK/65 tahun 1965.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

TARGET EKSPORT INDONESIA TAHUN 1965 DAN PENGAMANAN PELAKSANAANNYA sebagai berikut :

Pertama :

Target Ekspor tahun 1965 untuk seluruh Indonesia ditetapkan sebesar US \$. 600 djuta tidak termasuk :

1. Hasil Ekspor dari Daerah Pelabuhan Bebas Sabang dan Propinsi Irian Barat, dan
2. Hasil Ekspor minjak bumi dan hasil-hasilnya.

Kedua :

Dalam rangka melaksanakan prinsip berdiri diatas kaki sendiri dan pelaksanaan dekonsentrasi dalam rangka Ekonomi Terpimpin, maka untuk mentjapai target ekspor 1965 tersebut diatas, ditetapkan target ekspor 1965 untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I sebagaimana tertjantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga :

Para Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah dan Pantja-Tunggal Daerah Tingkat I diharapkan untuk memberikan fasilitas-fasilitas seperlunya dan mengamankan pelaksanaan;

1. Agar target ekspor 1965 untuk daerahnya masing² sebagai suatu program Nasional yang harus diambeg-parama-artakan dapat tertjapai.
2. Agar instruksi kami No. 008/3/MPLN/1/65 yang ditunjukkan kepada semua Pengusaha Ekspor diseluruh Indonesia dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Keempat :

Aparat² Pemerintah yang bertugas dibidang perdagangan ekspor seperti DEKT, BLLD, Bea dan Tju-

kai, komunikasi umumnja dan perhubungan laut chususnja agar mempergunakan wewenang dan tanggung-djawab yang diberikan kepadanya dengan penuh pengabdian kepada pelaksanaan perdagangan luar negeri.

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan pemepatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 29 Maret 1965.

**KUASA MENTERI PERDAGANGAN
 LUAR NEGERI,**

t.t.d.

(A. JUSUF)

Brigadir Djenderal T.N.I.

*Lampiran Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan
 Luar Negeri*

No. 010/3/MPLN/SK/65 tahun 1965.

**TARGET EKSPOR TAHUN 1965 PER DAERAH
 TINGKAT I**

**(TANPA MINJAK BUMI DAN
 HASIL-HASILNYA)**

(Koers 1 US \$ = Rp. 45,—)

*Daerah Tingkat I. Nilai dalam djutaan
 Rp./sebulan*

1. A t j e h	50,0
2. Sumatra Utara	650,0
3. Sumatra Barat	60,0
4. Riau (Riau Daratan dan Kepulauan)	63,0
5. D j a m b i	60,0
6. Sumatera Selatan (incl. Timah) ...	450,0
7. L a m p u n g	130,0
8. Djawa Barat	225,0
9. Djawa Tengah	55,0
10. Djawa Timur	150,0
11. B a l i	4,5
12. Nusa Tenggara Barat	2,0
13. Nusa Tenggara Timur	0,5
14. Kalimantan Barat	110,0
15. Kalimantan Selatan	80,0
16. Kalimantan Tengah	4,0
17. Kalimantan Timur	6,0
18. Sulawesi Selatan	60,0
19. Sulawesi Tengah	10,0
20. Sulawesi Tenggara	5,0
21. Sulawesi Utara	60,0
22. M a l u k u	15,0

Djumlah Target Ekspor sebulan 2.250,0

SERUAN

kepada

SEMUA IMPORTIR DAN SEMUA PEMAKAI DEvisa LAINNJA.

Mengingat INSTRUKSI kami No. 008/3/MPLN/I/65 tertanggal 22 Maret 1965 jang ditudjukan kepada SEMUA PENGUSAHA EKSPOR DI SELURUH INDONESIA dalam mana antara lain ditetapkan bahwa :

- a. Target ekspor Pemerintah mendjadi sebesar US \$. 600.— djuta tanpa hasil minjak bumi;
- b. Perdagangan ekspor jang mendjadi tulang punggung bagi penjelesaian Revolusi Indonesia harus dilaksanakan oleh semua Eksportir Indonesia, selaku Alat Revolusi jang sadar akan tugas dan kewajibannja;
- c. Usaha ekspor-drive harus mendapat prioritas pertama dalam segala kegiatan pengusaha ekspor Indonesia dan mendjadi Tugas Besar Nasional jang harus dihadapi dengan penuh ketekunan diatas segala pengorbanan;

maka diserukan kepada para Importir dan para pemakai devisa lainnja supaja menjadari fungsi sebagai Alat Revolusi dan Pembina Ekonomi Patriotik dan dengan demikian berusaha sekuat tenaga dan dengan segala daya mampu jang ada membantu dan mengabdikan dirinja kearah suksesnja pelaksanaan tugas² jang diberikan kepada semua pengusaha ekspor.

Berhubung dengan itu diminta agar dalam usaha impor diperhatikan se-dalam²nja pedoman² sbb. :

1. Usaha utama adalah impor bahan/penolong dan spareparts guna meningkatkan produksi pertanian, perkebunan dan pertambangan, jang dewasa ini merupakan sumber² utama daripada penghasilan devisa negara.

2. Usaha jang tidak kurang pentingnja adalah impor jang ditudjukan untuk mengembangkan serta mendorong industri² jang telah ada, untuk memproduksi barang² djadi jang dapat diekspor dan/atau merupakan pengganti daripada barang² jang sampai kini masih perlu diimpor.
3. Membatasi sedapat mungkin pembelian² dari luar negeri daripada barang² jang sudah dapat dihasilkan oleh alat² produksi dalam negeri dengan berazaskan pada prinsip "Berdiri diatas kaki sendiri".
4. Mengerahkan seluruh kekajaan devisa jang dimiliki masyarakat se-effisien²nja senada dan seirama dengan rising demands Revolusi kita.
5. Berpedoman pada azas Ambeg Parama Arta mengalihkan pengimporan barang² jang bersifat mewah pada barang² jang dibutuhkan oleh rakyat banjak demi terjijptanja masyarakat Sosialis Indonesia jang adil dan makmur.

Semoga Tuhan Jang Maha Kuasa memberkahi usaha kita bersama ini.

DJAKARTA, 9 APRIL 1965

KUASA MENTERI URUSAN
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

t.t.d.

(A. JUSUF)

Brig. Djen. TNI

Madjalah "WARTA PERDAGANGAN"

Bertudjuan antara lain untuk menanamkan serta memupuk pengertian bagi para pembatjanja tentang usaha-usaha Pemerintah dalam bidang perdagangan dalam dan luar negeri.

PELAKSANAAN POLITIK IMPORT TAHUN 1965.

Pelaksanaan impor tahun 1965 ini akan diselaras-kan dengan pembantingan stir seperti jang telah di-komandokan P.J.M. Presiden, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rentjana impor tahun 1965 disesuaikan dengan production approach, dan diutamakan pada bahan² Baku dan Penolong, Spare-parts untuk industri² demi kelantjaran produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memadjukan ekspor.
2. Lain dari pada tahun-tahun iang lalu, maka untuk tahun 1965 ini ditentukan pemakaian devisa berdasar dienis² barang pada punt 1 diatas setiara terarah sesuai dengan prinsip Ekonomi Terpimpin.
3. Dalam hal ini Departemen Perdagangan mempunjai peranan jang aktip dalam menentukan pelaksanaan perbelandiaan negara dengan *Devisa Negara* baik tunai maupun dalam rangka kredit luar negeri. Diuga dalam penjalurannja Departemen Perdagangan menentukan bahwa barang² tersebut harus langsung pada Konsumer-Produsen dengan dialan jang sependek-pendeknia dengan maksud untuk menghindarkan barang² tersebut mendjadi bahan manipulasi.
4. Departemen² lain jang dahulunia hanja sebagai pembagi devisa, sekarang diwajibkan menentukan Konsumer-Produsen mana jang ditundjuk sehingga Departemen² jang bersangkutan dapat lebih mengintensifkan *pengawasan* dan *kontrol* terhadap produktivitet dari produksi² unitnja.
5. Import dilaksanakan oleh Perusahaan Niaga Negara, atau langsung oleh Konsumer-Produsen Negara sendiri jang mempunjai unsur dan kemampuan untuk mengimpor, dan khusus untuk keperluan produksinja sendiri. Kepada Perusahaan Niaga Negara diserahi tanggung jawab penjalurannja sampai digudang konsumer-produsen.

6. Diika Perusahaan Niaga Negara atau Perusahaan² Negara lainnja telah tidak sanggup melaksanakan impor tersebut, maka dapat digunakan importir swasta jang bonafide dengan ketentuan harus langsung menjalurkan barang² jang di-impor kepada konsumer-produsen jang telah ditundjuk.
7. Pemiaiaian impor atas barang² tersebut harus diselenggarakan oleh para konsumer-produsen sendiri, demi tertjapainia harga pembelian jang serendah-rendahnja sehingga dapat memungkinkan tertjapainia pembentukan harga barang jang menguntungkan bagi masyarakat.
8. Untuk mentiegeh terdiadinia penimbunan barang jang akan merugikan, maka kepada importir di-wadibkan untuk *memberitahukan segera*, setelah barang iang diimpornia datang, kepada Departemen² jang bersangkutan dan para konsumer-produsen pemesan.

Dengan demikian dapat ditiegeh pengeluaran ongkos² pergudangan dan ongkos lainnia, dan barang dapat segera sampai ditangan konsumer-produsen. Hal ini harus mendiadi suatu usaha bersama antara importir dan para konsumer-produsen.

Kebidiaksanaan nelaksanaan impor tersebut diatas harus betul² dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh para belaksannja agar dapat ditjapai hasil² sebagai berikut :

- a. Penggunaan devisa negara dapat lebih effisen dan terarah.
- b. Impor lebih terentjana atas dasar jang realitis.
- c. Ongkos² jang tidak perlu dapat dihindarkan sehingga dapat mengakibatkan tertjapainia harga jang lebih menguntungkan dibandingkan dengan masa² sebelumnya.

Djakarta, 10 April 1965.

Staf Pribadi Kuasa Menteri
Perdagangan Luar Negeri.

Madjalah "WARTA PERDAGANGAN"

Selain memuat Kebidjaksanaan/Peraturan² Pemerintah dalam bidang perdagangan djuga akan menjadjikan bagi para pembatjanja, ulasan-ulasan dari *pembantu-pembantu ahlinja* beserta matjam² rubriek seperti : *Varia Perdagangan. Internasional, Issue's on Economic Development* dsb.

PENGUMUMAN DAN SERUAN

1. Pengumuman dan seruan ini ditujukan kepada masyarakat perdagangan pada khususnya baik para eksportir dan importir maupun para pengusaha dalam bidang perdagangan dalam negeri.
2. Demi kelanjutan tatakerdja Departemen Perdagangan, dimana prinsip "open-management" didjunjung tinggi serta untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat perdagangan tersebut, kepada mereka diminta supaya dalam mengurus segala kepentingannya yang terletak dalam bidang urusan Departemen Perdagangan, untuk *berhubungan langsung* dengan pejabat Direktorat Ekspor, Direktorat Impor dan Direktorat Pengadaan dan Penjaluran.
3. Djanganlah hendaknya para pengusaha yang bonafide menggunakan jasa-djasa dari pihak ketiga (perantara) yang mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya tindakan penjelewengan yang bukan saja mengingkari kebidjaksanaan Pemerintah dalam bidang perdagangan, bahkan merugikan kepentingan masyarakat dan negara pada keseluruhnja.
4. Semua pejabat-pejabat di Departemen Perdagangan tersebut dapat dihubungi setjara langsung dan dengan mudah dikantor mereka masing² selama wak'u djamkerdja dan bersedia serta sanggup memberikan pelayanan sebaik mungkin dalam bidang pelaksanaan tugas masing-masing pejabat.
5. Untuk mempertinggi efisiensi tatakerdja Departemen Perdagangan, kepada para pengusaha dalam bidang perdagangan diharapkan untuk melaporkan baik kesulitan-kesulitan prosedural (birokrasi) yang dialami serta hal-hal yang tidak wajar, maupun bersedia mengajukan usul-usul yang konkrit dan konstruktif kepada Departemen Perdagangan dalam hal ini ditugaskan Direktorat Marketing dan Research.
6. Demikian agar pengumuman dan seruan ini mendapat perhatian seperlunya, dan dari para eksportir, importir dan pengusaha-pengusaha lainnya dalam bidang perdagangan dalam negeri sendiri diminta pengertian dan kerdjasama untuk bersama-sama dengan Departemen Perdagangan mensukseskan target ekspor, pelaksanaan kebidjaksanaan impor yang telah ditetapkan untuk tahun 1965 ini dan mengusahakan stabilisasi pengadaan dan penjaluran di dalam negeri.

Djakarta, 27 April 1965

MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI/
KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

t.t.d.

A. J U S U F

Brig. Djenderal T.N.I.

K E P U T U S A N
PRESIDIUM KABINET REPUBLIK INDONESIA
NO. Aa/B/44/65 TAHUN 1965.

t e n t a n g

**Integrasi Wewenang Urusan Perdagangan
Luar Negeri**

PRESIDIUM KABINET REPUBLIK INDONESIA.

MENIMBANG :

- a. bahwa perdagangan luar negeri adalah salah satu unsur yang penting bagi penyelesaian Revolusi Indonesia pada umumnya dan bagi pembangunan ekonomi nasional khususnya, guna mempertajam terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia;
- b. bahwa untuk itu, perlu wewenang dibidang pelaksanaan Urusan Perdagangan Luar Negeri diintegrasikan.

MENINGAT :

Keputusan Presiden No. 40 tahun 1965;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

INTEGRASI WEWENANG URUSAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI dengan ketentuan sebagai berikut :

Pertama :

Semua aparaturnya Pemerintah dan badan usaha Negara yang bergerak dibidang perdagangan luar negeri baik yang berada dipusat, didaerah tingkat I maupun yang berada diluar negeri, setjara taktis, teknis dan fungsional diintegrasikan kedalam wewenang dan tugas Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri; selanjutnya disebut Menteri Koordinator.

Kedua :

1. Perdagangan Luar Negeri harus merupakan suatu usaha yang bersifat nasional (national effort);
2. Instansi-instansi yang berwenang dibidang fiskal, moneter, komunikasi, penetapan harga barang² ekspor dan lain², harus mendukung usaha² perdagangan luar negeri yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator tersebut diatas.

Ketiga :

Dalam melaksanakan wewenang/tugas tersebut diatas Menteri Koordinator dibantu oleh suatu (Board) yang terdiri dari unsur² yang bersangkutan yang dianggap perlu.

Keempat :

Pelaksanaan wewenang tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan :

1. Penetapan kebidjaksanaan, perentjanaan, dan pengawasan diatur ditingkat Pusat,
2. Dalam rangka kebidjaksanaan dan rentjana tersebut pada ayat 1 maka aparaturnya Pemerintah yang bergerak dibidang perdagangan luar negeri yang ada di Daerah Tingkat I berwenang untuk menentukan kebidjaksanaan teknis sesuai dengan keadaan setempat.

Kelima :

Hal² lain yang diperlukan untuk melaksanakan Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Keenam :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 29 Maret 1965.

PRESIDIUM KABINET REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(DR. SOEBANDRIO).

Pendjelasan mengenai Organisasi dan Susunan baru

DEPARTEMEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN URUSAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 40 tahun 1965 perihal Pengintegrasian Perdagangan Luar Negeri dengan politik perdagangan luar negeri, maka Departemen Perdagangan setjara fungsional mendjadi :

- a. Urusan Perdagangan Luar Negeri dibawah Koordinasi Menko Kompartimen Luar Negeri/ Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.
- b. Departemen Perdagangan Dalam Negeri dibawah Koordinasi Menko Kompartimen Distribusi.

Dengan ditetapkannja pertama Organisasi dan Susunan dari Urusan Perdagangan Luar Negeri dengan Surat Keputusan Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri No. 001/3/MPLN/SK/65 tgl. 15 Maret 1965 dan kedua Organisasi dan Susunan Departemen Perdagangan Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri No. 001/MPDN/SK/65 tgl. 9 April 1965, maka tugas, fungsi dan kegiatan ditetapkan untuk :

1. *Urusan Perdagangan Luar Negeri :*
 - a. Menteri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri;
 - b. Pembantu Utama Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri;
 - c. Direktorat Hubungan Perdagangan Luar Negeri;
 - d. Direktorat Ekspor;
 - e. Direktorat Impor;
 - f. Direktorat Marketing dan Research;
 - g. Sekretariat Umum;
 - h. Staf Pribadi (Menteri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri).
2. *Departemen Perdagangan Dalam Negeri :*
 - a. Menteri Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Pembantu Utama Menteri Perdagangan Dalam Negeri;
 - c. Direktorat Pengadaan dan Penjaluran;
 - d. Direktorat Harga;
 - e. Direktorat Metrologie;
 - f. Direktorat Administrasi;
 - g. Sekretariat Umum;
 - h. Staf Pribadi (Menteri Perdagangan Dalam Negeri).
3. Dengan berlakunja kepu²usan² tersebut diatas, maka Direktorat-Direktorat, Biro-Biro dan Kantor jang dibebaskan dari tugas-tugasnja adalah :
 - a. Direktorat Pembelian Pemerintah;
 - b. Direktorat Penerangan Komersil;
 - c. Biro Research dan Planning;
 - d. Biro Bimbingan OPS/GPS;
 - e. Biro Pengawas Keuangan;
 - f. Biro Irian Barat;
 - g. Kantor Kopra;

4. Perlu didjelaskan bahwa sesuai dengan *fungsi dan kegiatannja jang baru* maka ada 2 (dua) Direktorat jang mengalami perubahan dalam namanja :

- a. ex Direktorat Perdagangan Dalam Negeri mendjadi Direktorat Pengadaan dan Penjaluran.
- b. ex Direktorat Marketing, Normalisasi dan Standardisasi mendjadi Direktorat Marketing dan Research.

5. Follow-up selanjutnja dari adanja re-organisasi tersebut, kemudain ditetapkan :

- a. Dengan S.K. Menteri Perdagangan Dalam Negeri tgl. 11 April 1965 No. 014A/4/MPDN/SK/65, maka prosedur pembelian oleh Instansi Pemerintah jang daulu diselenggarakan melalui Direktorat Pembelian Pemerintah, kini dapat diselenggarakan langsung kepada suppliers.
- b. Dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 041/4/MPLN/SK/65 tgl. 30 April 1965, tugas² ex Kantor Kopra jang terletak dalam bidang penentuan kebijaksanaan pemasaran, ditampung oleh Direktorat Marketing dan Research.
- c. Dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 006/MPDN/SK/65, Urusan Marketing dan Research jang terletak dalam bidang Perdagangan Dalam Negeri, diserahkan kepada Direktorat-Marketing dan Research Urusan Perdagangan Luar Negeri Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.
- d. Dengan Surat Keputusan bersama Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri tanggal 9 April 1965 ditetapkan, bahwa penerbitan madjalah, dan berita² pers serta publikasi berkala lainnja sebagai media resmi baik dari Departemen Perdagangan Dalam Negeri maupun dari Urusan Perdagangan Luar Negeri Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri, penjelenggaraannya ditugaskan kepada Direktorat Marketing dan Research.
- e. Achirnja dengan reorganisasi dan penjederhanaan organisasi Departemen Perdagangan Dalam Negeri, maka tugas-tugas ex Direktorat Penerangan Komersil dan ex Biro Research dan Planning kini ditampung oleh Direktorat Marketing dan Research; tugas ex Biro Bimbingan OPS/GPS oleh Direktorat Pengadaan dan Penjaluran; tugas ex Biro Pengawas Keuangan oleh Direktorat Administrasi mendjadi Bagian Pengawas Keuangan, sedangkan Biro Irian Barat kini telah dibubarkan.

6. Djuga sebagai follow-up dari keputusan mengenai Organisasi dan Susunan Urusan Perdagangan Luar Negeri maka telah ditetapkan :

a. Dengan Surat Keputusan Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri No. 011/4/MPLN/SK/65 tgl. 1 April 1965 Indonesian Supply Mission di New York dibebaskan dari tugas-tugasnja terhitung mulai tanggal 1 April 1965, sedangkan pembubarannja harus selesai pada tgl. 1 Mei 1965.

b. Dengan Surat Keputusan Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri No. 012/4/MPLN/SK/65 tgl. 1 April 1965 Panitia Hasil Bumi di Amsterdam dan di Tokyo terhitung mulai dari tgl. 1 April 1965 dibebaskan dari segala tugas-tugasnja, sedangkan pembubarannja harus selesai pada tgl. 1 Mei 1965.

Djakarta, 13-5-1965
(DIMAR)

SURAT PENETAPAN
KETUA BADAN KERDJA DEWAN PRODUKSI NASIONAL
No. 003/111. u/BK/1965, tgl. 3-4-1965
Tentang
PENETAPAN TARGET NILAI EKSPOR 1965

MENTERI KOORDINATOR KOMPARTIMEN PERTANIAN DAN AGRARIA/KETUA BADAN KERDJA DEWAN PRODUKSI NASIONAL.

Menimbang :

- a. bahwa agar dapat dilaksanakan ketetapan Pemerintah untuk meningkatkan hasil ekspor Pertanian/Agraria 1965 (tanpa minjak bumi dan hasil-hasilnja dan tanpa timah) sehingga mentjapai US. \$. 530 djuta perlu segera dilangkahkan gerakan-gerakan peningkatan dan pengamanan produksi, sesuai dengan keputusan P.J.M. Presiden/Panglima Besar KOTOE;
- b. bahwa untuk memastikan arah gerakan² tersebut perlu segera pula ditetapkan target nilai ekspor jang harus dihasilkan dari masing² bidang produksi;

Mengingat :

Peraturan Presiden No. 4 tahun 1964 tanggal 14 Maret 1964, kemudian disempurnakan dengan Peraturan Presiden No. 27/1964 tanggal 24 Agustus 1964;

Mendengar :

- a. Rapat Team Pembina Bahan Ekspor pertanian dalam arti luas pada tanggal 17 Maret 1965;
- b. Rapat Kerdja Menko Kompag/Ketua Badan Kerdja Dewan Produksi Nasional pada tanggal 19 Maret 1965;
- c. Rapat Kerdja Menko Kompag/Ketua Badan Kerdja Dewan Produksi Nasional pada tanggal 30 dan 31 Maret 1965;
- d. Kesanggupan dan saran² para J.M. Menteri² Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Pertanian P.M.D. dan Agraria;

MEMUTUSKAN :

Pertama :

Menetapkan target nilai Ekspor dari Bahan Ekspor Pertanian untuk tahun 1965 sebagai jang berikut :

Target Ekspor Hasil² Pertanian/Agraria 1965.

Diperoleh dari :	Nilai Ekspor U.S. \$
1. Departemen Pertanian.	
a. Pertanian Rakjat	300.000.000,—
b. Gula dan tetes	17.000.000,—
c. Gaplek	2.000.000,—
d. Djagung	15.000.000,—
2. Departemen Perkebunan	
Perkebunan PPN dan Swasta	20.000.000,—
PPN (.....)	
Swasta	
3. Departemen Kehutanan	
Kaju dan hasil hutan lainnja	12.000.000,—
Perhutani Swasta	
4. Departemen Perikanan	
Ikan dan hasil laut lainnja	1.500.000,—
5. Departemen Pertanian bidang Kehewanan	
Hewan ternak, binatang liar dan kulit hewan	8.000.000,—
Perhewani Swasta	40% 60%
Djumlah	550.500.000,—
Dibulatkan	550.000.000,—

Kedua :

Target² ekspor tsb. pada Pertama selandjutnja akan diperintji mendjadi target² ekspor daerah² Swatantra tingkat I, jang dengan aparatur Baprodanja harus mengerahkan dan menggerakkan segenap dana dan daja-tenaganja untuk merealisasikan target masing² daerah.

Ditetapkan di Djakarta,
Pada tanggal 3 April 1965.

MENTERI KOORDINATOR KOMPARTIMEN PERTANIAN DAN AGRARIA/KETUA BADAN KERDJA DEPRONAS,
ttd.

(SADJARWO S.H.)

MENTERI URUSAN BANK SENTRAL :

ADANJA SELISIH ANTARA ANGKA NILAI EKSPOR MENURUT DIREKTORAT BEA DAN TJUKAI DAN ANGKA PENERIMAAN DEvisa MENURUT BANK-BANK DEvisa.

Sedjak beberapa waktu Pemerintah telah mengadakan penjelidikan tentang selisih antara angka-angka ekspor jang dilaporkan oleh *Direktorat Bea dan Tjukai* dan angka-angka penerimaan devisa dari ekspor jang dilaporkan oleh *Bank-Bank Devisa*. Kedua sumber ini melaporkan angka-angka mengenai tahun 1963 dan 1964 jang demikian banjak berbedanja sehingga menimbulkan pertanyaan: apakah mungkin terdjadi ekspor jang devisanja tidak diterima?

Soal ini telah disinggung pula oleh Wakil Perdana Menteri I Dr Subandrio pada upatjara serah-terima daripada Departemen Perdagangan Dalam Negeri pada tanggal 6 April j.b.l.

Penjelidikan Pemerintah dalam persoalan ini masih berlangsung dan dipimpin oleh sebuah Panitia terdiri dari 5 Menteri jang didampingi oleh sebuah Team terdiri dari beberapa Pedjabat Tinggi.

Hasil pertama daripada penjelidikan jang sampai kini telah diperoleh adalah *kepastiann* bahwa selisih antara angka-angka dari Bea dan Tjukai dan angka-angka devisa *tidaklah* berdjumlah beberapa ratus djuta US.\$, seperti semula dikirakan dan dikabarkan, akan tetapi selisih jang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- untuk seluruh tahun 1963 sebesar Rp 600 djuta (\pm US.\$ 13 djuta)
- untuk setengah tahun pertama 1964 sebesar Rp 800 djuta (\pm US.\$ 18 djuta)
- untuk setengah tahun kedua 1964 belum dapat diperhitungkan selisih jang sebenarnya karena bahan-bahan belum terkumpul seluruhnja.

Dalam penjelidikan jang telah dilakukan itu ternyata bahwa tingginja angka-angka Bea dan Tjukai a.l. disebabkan karena pelaporan Bea dan Tjukai tentang nilai Timah jang diekspor sesudah tanggal 17 April 1964 didasarkan atas nilai transaksi dari valuta asing (US.\$ 1.— Rp 250,—), sedangkan angka

penerimaan devisa dari Timah i-u diperhitungkan nilainja atas kurs resmi (US.\$ 1.— = Rp 45.—). Sudah djelaslah bahwa penggunaan kurs jang berlainan ini menghasilkan perbedaan jang besar antara angka-angka dari Bea dan Tjukai dan angka-angka penerimaan devisa.

Meskipun perhitungan jang telah dilakukan telah menunjukkan bahwa selisih jang sebenarnya antara angka-angka Bea dan Tjukai dan angka-angka penerimaan devisa adalah djauh lebih ketjil daripada jang tadinja dikabarkan terdapat, namun penjelidikan mengenai selisih-selisih ini dengan giatnja dan dengan seksama masih dilangsungkan. Pada taraf penjelidikan jang telah ditjapai hingga kini *tidaklah* dapat dipastikan, bahwa selisih-selisih jang sebenarnya masih terdapat antara angka-angka dari kedua sumber termaksud, disebabkan karena terdjadinja manipulasi dibidang ekspor. Selisih-selisih itu mungkin sekali disebabkan karena soal-soal jang bersifat administratif-teknis belaka. Akan tetapi, apabila dalam penjelidikan selandjutnja memang ternyata bahwa manipulasi telah dilakukan, maka tidaklah usah dichawatirkan bahwa manipulasi, betapaketjilnja atau besarnya djumlah devisa jang tersangkut, tidak akan dapat diketahui. Dan Pemerintah khususnya Bank Indonesia sebagai penanggungjawab mengenai penerimaan dan pengeluaran devisa, tidak akan tertahan oleh siapapun atau oleh apapun dalam mengedjar manipulator-manipulator jang bersangkutan.

Sistim pengawasan terhadap ekspor dan penerimaan devisa jang sekarang berlaku dengan mudah menjedjikan bahan-bahan untuk menemukan kembali setiap pengeluaran barang jang terdjadi dengan djumlah devisa jang harus diterima oleh Negara untuk ekspor itu.

Demikian antara lain keterangan J.M. Menteri Urusan Bank Sentral kepada Pers.

Djakarta, 9-4-1965

**MASIH TERSEDIA DALAM DJUMLAH TERBATAS.
BUKU TRADE DIRECTORY OF INDONESIA
1964/1965**

BERGUNA SEKALI BAGI PARA PENGUSAHA
Tebal Buku : 752 Halaman
Kertas (isi) : Kuntsdruk
Sampul : Batik
Harga : Rp. 15.000,—. per/ex.

Pesanan dialamatkan kepada :
Direktorat Marketing dan Research
Seksi Publikasi.
Djl. Tanah Abang Timur 87,
Djakarta

**NILAI EKSPOR DAN
NILAI IMPOR
TIAP-TIAP NEGARA**

Varia Perdagangan

INTERNASIONAL

Berdasarkan angka² dari Statistical Year-book (United Nations, 1962) dalam Tabel berikut ini diberikan nilai ekspor dan nilai impor negara² tertentu disusun menurut besarnya nilai ekspor tiap-tiap negara dibitung dalam djutaan US dollar untuk tahun 1961.

Negara	Ekspor	Impor	Negara	Ekspor	Impor
Amerika Serikat	20.755	14.702	39. Philipina	499	611
Djerman Barat	12.687	10.941	40. Peru	494	468
Inggris	10.308	11.864	41. Colombia	434	557
Prantjis	7.210	6.678	42. R. P. A.	485	678
Uni Soviet	5.998	5.832	43. Muang Thai	477	485
Kanada	5.811	5.694	44. Pakistan	400	642
Belanda	4.307	5.112	45. Srilangka	364	358
Djepang	4.236	5.810	46. Turki	347	509
Italia	4.188	5.222	47. Maroko	343	452
Belgia-Luxemburg	3.924	4.219	48. Portugal	326	656
Swedia	2.743	2.927	49. Chana	292	394
Venezuela	2.413	1.051	50. Junani	223	714
Australia	2.324	2.093	51. Birma	220	216
Tjekoslowakia	2.046	2.024	52. Uruguay	175	208
Djerman Timur	2.042	2.019	53. Rep. Dominica	143	69
Switserland	2.041	2.707	54. Ecuador	127	101
Denmark	1.537	1.873	55. El Salvador	119	112
Polandia	1.504	1.687	56. Guatemala	115	134
Brazilia	1.403	1.460	57. Iran	111	572
India	1.386	2.246	58. Syria	110	199
Austria	1.202	1.485	59. Costa Rica	84	107
Finlandia	1.054	1.153	60. Liberia	83 ³⁾	91
Hongaria	1.029	1.026	61. Ethiopia	76	93
R. R. T.	1.000 ¹⁾	1.016 ¹⁾	62. Honduras	73	72
Argentina	964	1.460	63. Iceland	71	75
Norwegia	931	1.616	64. Vietnam	71	255
Malaya	857	728	65. Kambodja	63	97
Mexico	826	1.139	66. Nicaragua	61	74
Selandia Baru	793	901	67. Bolivia	56	73
Rumania	793	815	68. Afganistan	49 ³⁾	58 ⁴⁾
INDONESIA	784	794	69. Albania	49 ³⁾	81 ⁵⁾
Spanjol	710	1.092	70. Libanon	42	343
Irak	662 ²⁾	408 ²⁾	71. Korea Selatan	41	316
Bulgaria	661	666	72. Haiti	32	35
Kuba	617 ²⁾	808 ²⁾	73. Paraguay	31	35
Jugoslavia	569	910	74. Panama	30	124
Chili	508	585	75. Jordania	15	117
Irlandia	505	732	76. Laos	1	17

Tabel

1961

1961

1961

KURS¹ JANG DIPAKAI DALAM BIDANG LALU LINTAS DEvisa.

Berhubung masih sering terdjadi kesalahan² dan salah pengertian dalam mempergunakan kurs, baik mengenai istilah, maupun mengenai angka jang harus dipakai, maka dibawah ini diperintji djenis dengan istilah jang harus dipakai dari kurs² jang berlaku dalam bidang lalu lintas devisa.

Kurs dasar	: disingkatkan	Kd.
Kurs Nilai Transaksi Rupiah	: „	KNTR
Kurs Transaksi Dana Devisa (antara Dana Devisa dengan Bank)	: „	KTDD
Kurs Transaksi Bank beli (antara Bank dengan langganan)	: „	KTbB
Kurs Transaksi Bank djual (antara Bank dengan langganan)	: „	KTbD
Kurs Devisa Pelengkap beli (antara Bank dengan langganan)	: „	KDPb
Kurs Devisa Pelengkap djual (antara Bank dengan langganan)	: „	KDPd

Bersama ini dilampirkan :

1. daftar kurs jang berlaku terhadap berbagai valuta asing,
2. daftar kurs konversi valuta asing berdasarkan kurs I.M.F., dan
3. daftar shillings dan pence dinjatakan dalam desimal dari Pond Sterling.

Untuk keseragaman diharap supaja singkatan valuta ditulis sebagaimana tertera dalam lampiran 1.

Pengumuman BLLD No. 9/U/BLLD/65 tgl. 14-4-'65.

**PIMPINAN
BIRO LALU LINTAS DEvisa
DIREKTORIUM**

R.A. Kartadjoemena

Martoyo Koento

TJATATAN REDAKSI :

Lampiran 1, pada halaman 39, dan lampiran 3 pada halaman 40.

Lampiran 2 Pengumuman B.L.L.D. No. 9/U/BLLD/65 tgl. 15 April 1965.
DAFTAR KURS KONVERSI VALUTA ASING BERDASARKAN KURS I.M.F.

Djenis Valuta	N. Gld.	D.M.	Sw. Fr.	E. £.	Rupce	Hk. \$.	A. £.	US. \$
1 N.Gld.	1.—	1.104972375	1.207955801	0.0986582478	1.315443304	1.578531965	0.1233228097	0.276243
1 D.M.	0.905	1.—	1.0932	0.0892857142	1.19047616	1.428571428	0.1116071420	0.25
1 Sw. Fr.	0.827844859	0.9147457	1.—	0.0816737232	1.088982949	1.306779572	0.102092154	0.22 ⁿ
1 E. £.	10.136	11.2	12.24384	1.—	13.333333	16.—	1.25	2.80
1 Rupce	0.760200019	0.84	0.918288022	0.075	1.—	1.2	0.09375	0.21
1 Hk. \$.	0.6335	0.7	0.76524	0.0625	0.833333	1.—	0.078125	0.17 ^s
1 A. £.	8.1088	8.96	9.795072	0.8	10.6666664	12.80	1.—	2.24

Dalam Rupiah.

Kode Valuta :	Djenis Valuta	Singkatan valuta :	KD	KNTR	KTDD ¹⁾ (setjara berkala berubah)
01	U.S. Dollar	US. \$.	45,—	250,—	250,—
03	Pound Sterling	E. £.	126,—	700,—	697,81
02	Canadian Dollar	Can. \$.	41,625	231,27	
08	Pakistan Rupes	Pak. Rs.	9,45	52,50	
09	Indian Rupee	India Rs.	9,45	52,50	
10	Ceylon Rupee	Ceylon Rs.	9,45	52,50	
11	Burmese Kyat	Kyat	9,45	52,50	
12	Malayan Dollar	Mal. \$.	14,70	81,67	
14	Hongkong Dollar	HK. \$.	7,88	43,75	
15	Australian Pound	A. £.	100,80	560,—	
16	New Zealand Pound	NZ. £.	126,—	700,—	
17	South African Pound	SA. £.	126,—	700,—	
20	Netherlands Guilder	N. Gld.	12,43	69,06	
21	Belgian Franc	B. Fr.	0,90	5,—	
22	Danish Crown	D. Kr.	6,52	36,19	
23	German Mark	DM.	11,25	62,50	
26	Italian Lire	Lire	0,072	0,40	
27	Austrian Schilling	Aus. Sch.	1,7308	9,6154	
28	Norwegian Crown	N. Kr.	6,30	35,—	
29	Escudo	Esc.	1,5652	8,6957	
30	Swedish Crown	Zw. Kr.	8,70	48,33	
31	Swiss Franc	Sw. fr.	10,29	57,17	
74	Antillen Guilder	Ant. f.	23,86	132,51	
89	Surinam Guilder	Sur. f.	23,86	132,51	
96	French Franc	Fr. fr.	9,12	50,64	
97	R a n d	Rand	63,—	350,—	
99	Rupiah Irian Barat	IB. Rp.	12,43	69,06	

Lihat daftar yang diumumkan oleh Bank Indonesia.

1) Setjara berkala diumumkan oleh Bank Indonesia; demikian juga kurs² KTBb, KTBd.

TARGET EKSPOR BAHAN PERTANIAN JANG HARUS DIPENUHI OLEH TIAP² DAERAH TINGKAT I

Daerah Tingkat I :		Djumlah :		Daerah Tingkat I :		Djumlah :	
			US.\$.				US.\$.
Atjeh	16	djuta		Kalimantan Tengah	2	djuta	
Sumatra Utara	175	"	"	Kalimantan Selatan	23	"	"
Riau	18	"	"	Kalimantan Timur	2	"	"
Sumatra Barat	18	"	"	Sulawesi Utara	18	"	"
Djambi	18	"	"	Sulawesi Tengah	3	"	"
Sumatra Selatan	125	"	"	Sulawesi Selatan	18	"	"
Lampung	36	"	"	Sulawesi Tenggara	2	"	"
Djawa Barat	60	"	"	Maluku	5	"	"
Djawa Tengah	15	"	"	Nusa Tenggara Timur	0,2	"	"
Djawa Timur	40	"	"	Nusa Tenggara Barat	1,2	"	"
Kalimantan Bara ²	31	"	"	Nusa Tenggara Tengah	0,53	"	"

Sumber : Dengan Produk Nasional

SHILLINGS DAN PENCE DINJATAKAN DALAM DECIMALEN DARI POUND-STERLING.

1 £. = 20 sh. 1 sh. = 12 p. 1 p. = £. 0,00417

0- 1 = 00417	4- 0 = 20000	8- 0 = 40000	12- 0 = 60000	16- 0 = 80000
0- 2 = 00833	4- 1 = 20417	8- 1 = 40417	12- 1 = 60417	16- 1 = 80417
0- 3 = 01250	4- 2 = 20833	8- 2 = 40833	12- 2 = 60833	16- 2 = 80833
0- 4 = 01667	4- 3 = 21250	8- 3 = 41250	12- 3 = 61250	16- 3 = 81250
0- 5 = 02083	4- 4 = 21667	8- 4 = 41667	12- 4 = 61667	16- 4 = 81667
0- 6 = 02500	4- 5 = 22083	8- 5 = 42083	12- 5 = 62083	16- 5 = 82083
0- 7 = 02917	4- 6 = 22500	8- 6 = 42500	12- 6 = 62500	16- 6 = 82500
0- 8 = 03333	4- 7 = 22917	8- 7 = 42917	12- 7 = 62917	16- 7 = 82917
0- 9 = 03750	4- 8 = 23333	8- 8 = 43333	12- 8 = 63333	16- 8 = 83333
0-10 = 04167	4- 9 = 23750	8- 9 = 43750	12- 9 = 63750	16- 9 = 83750
0-11 = 04583	4-10 = 24167	8-10 = 44167	12-10 = 64167	16-10 = 84167
	4-11 = 24583	8-11 = 44583	12-11 = 64583	16-11 = 84583
1- 0 = 05000	5- 0 = 25000	9- 0 = 45000	13- 0 = 65000	17- 0 = 85000
1- 1 = 05417	5- 1 = 25417	9- 1 = 45417	13- 1 = 65417	17- 1 = 85417
1- 2 = 05833	5- 2 = 25833	9- 2 = 45833	13- 2 = 65833	17- 2 = 85833
1- 3 = 06250	5- 3 = 26250	9- 3 = 46250	13- 3 = 66250	17- 3 = 86250
1- 4 = 06667	5- 4 = 26667	9- 4 = 46667	13- 4 = 66667	17- 4 = 86667
1- 5 = 07083	5- 5 = 27083	9- 5 = 47083	13- 5 = 67083	17- 5 = 87083
1- 6 = 07500	5- 6 = 27500	9- 6 = 47500	13- 6 = 67500	17- 6 = 87500
1- 7 = 07917	5- 7 = 27917	9- 7 = 47917	13- 7 = 67917	17- 7 = 87917
1- 8 = 08333	5- 8 = 28333	9- 8 = 48333	13- 8 = 68333	17- 8 = 88333
1- 9 = 08750	5- 9 = 28750	9- 9 = 48750	13- 9 = 68750	17- 9 = 88750
1-10 = 09167	5-10 = 29167	9-10 = 49167	13-10 = 69167	17-10 = 89167
1-11 = 09583	5-11 = 29583	9-11 = 49583	13-11 = 69583	17-11 = 89583
2- 0 = 10000	6- 0 = 30000	10- 0 = 50000	14- 0 = 70000	18- 0 = 90000
2- 1 = 10417	6- 1 = 30417	10- 1 = 50417	14- 1 = 70417	18- 1 = 90417
2- 2 = 10833	6- 2 = 30833	10- 2 = 50833	14- 2 = 70833	18- 2 = 90833
2- 3 = 11250	6- 3 = 31250	10- 3 = 51250	14- 3 = 71250	18- 3 = 91250
2- 4 = 11667	6- 4 = 31667	10- 4 = 51667	14- 4 = 71667	18- 4 = 91667
2- 5 = 12083	6- 5 = 32083	10- 5 = 52083	14- 5 = 72083	18- 5 = 92083
2- 6 = 12500	6- 6 = 32500	10- 6 = 52500	14- 6 = 72500	18- 6 = 92500
2- 7 = 12917	6- 7 = 32917	10- 7 = 52917	14- 7 = 72917	18- 7 = 92917
2- 8 = 13333	6- 8 = 33333	10- 8 = 53333	14- 8 = 73333	18- 8 = 93333
2- 9 = 13750	6- 9 = 33750	10- 9 = 53750	14- 9 = 73750	18- 9 = 93750
2-10 = 14167	6-10 = 34167	10-10 = 54167	14-10 = 74167	18-10 = 94167
2-11 = 14583	6-11 = 34583	10-11 = 54583	14-11 = 74583	18-11 = 94583
3- 0 = 15000	7- 0 = 35000	11- 0 = 55000	15- 0 = 75000	19- 0 = 95000
3- 1 = 15417	7- 1 = 35417	11- 1 = 55417	15- 1 = 75417	19- 1 = 95417
3- 2 = 15833	7- 2 = 35833	11- 2 = 55833	15- 2 = 75833	19- 2 = 95833
3- 3 = 16250	7- 3 = 36250	11- 3 = 56250	15- 3 = 76250	19- 3 = 96250
3- 4 = 16667	7- 4 = 36667	11- 4 = 56667	15- 4 = 76667	19- 4 = 96667
3- 5 = 17083	7- 5 = 37083	11- 5 = 57083	15- 5 = 77083	19- 5 = 97083
3- 6 = 17500	7- 6 = 37500	11- 6 = 57500	15- 6 = 77500	19- 6 = 97500
3- 7 = 17917	7- 7 = 37917	11- 7 = 57917	15- 7 = 77917	19- 7 = 97917
3- 8 = 18333	7- 8 = 38333	11- 8 = 58333	15- 8 = 78333	19- 8 = 98333
3- 9 = 18750	7- 9 = 38750	11- 9 = 58750	15- 9 = 78750	19- 9 = 98750
3-10 = 19167	7-10 = 39167	11-10 = 59167	15-10 = 79167	19-10 = 99167
3-11 = 19583	7-11 = 39583	11-11 = 59583	15-11 = 79583	19-11 = 99583

$\frac{1}{8}$ p. = £. 0,0005208
 $\frac{1}{4}$ p. = £. 0,0015625
 $\frac{3}{8}$ p. = £. 0,0026041
 $\frac{1}{2}$ p. = £. 0,0036458

$\frac{3}{8}$ p. = $\frac{1}{4}$ p. = £. 0,0010416
 $\frac{1}{2}$ p. = $\frac{1}{2}$ p. = £. 0,0020833
 $\frac{3}{4}$ p. = $\frac{3}{4}$ p. = £. 0,0031250

Anda ingin SUKSES dalam Perdagangan ?

Datangilah

P.N. PEMBANGUNAN NIAGA



**Aparat Revolusi dalam
bidang perdagangan :**

IMPOR

EKSPOR

KONTRAKTOR

PROJEK dan INDUSTRI

Untuk suksesnja usaha anda, harap berhubungan dengan :

P.N. PEMBANGUNAN NIAGA

Division² :

- 1. IMPOR BAHAN BANGUNAN**
- 2. IMPOR ALAT² BESAR/MESIN²**
- 3. IMPOR MESIN² SANDANG**

Alamat :

**Djl. Hajam Wuruk no. 127.
D J A K A R T A**

Division² :

- 1. IMPOR SANDANG PANGAN**
- 2. IMPOR BAHAN² CHEMICALIEN/PHARMASI**
- 3. E K S P O R**

Alamat :

**Djl. Gajah Mada no. 18.
D J A K A R T A**

ALAMAT² PERWAKILAN PERUSAHAAN NIAGA NEGARA DI LUAR NEGERI

TEMPAT KEDUDUKAN DAN NAMA PERWAKILAN

I. L O N D O N

1. **Central Indonesian Trading Co. Ltd.**
Plantation House Fenchurch Str. London
EC. 3
Cable CITCOLON — LONDON
2. **Judaniaga (London) Ltd.**
34, Lawrence Crescent Mollison Way
E DG Ware, Middlesex London
Cable: YUDAGO

II. H A M B U R G

1. **Central Trading Company GmbH.**
Hohe Bleichein 11 Hamburg 36
CITCOHA — HAMBURG
2. **Dharma Niaga Trading GmbH.**
68 Colonaden Hamburg 36
Cable BUDHAM — HAMBURG

III. B R E M E N

1. **Yuda Niaga Import/Eksport GmbH.**
Am Wall 162/163 Bremen
Cable YUDANIAGA BREMEN

IV. N E W Y O R K

1. **Central Indonesian Trading Co. Inc.**
100 Broadway Room 1510 New York 5,
N.Y.
Cable: CENTRANEW NEW YORK
2. **Yuda Niaga Incorporated**
120 Broadway New York 5, N.Y.
Cable: YUNIAGA — NEW YORK

V. T O K Y O

1. **Central Trading Co. (Japan) Ltd.**
Togin Building Room 503, 2, 1 Chome
Machi, Bunkyo-Ku Tokyo
CABLE: CITCOJA — TOKYO
2. **Yuda Niaga (Japan) Co. Ltd.**
Nisseki Building 3 Floor, 4,-1-Chome
Shibatamura-Cho Minat Ku, Tokyo
CABLE: YUNIAGA — TOKYO
3. **Japan International Agencies Ltd.**
Zenteikaikan, 8 floor 2, 1 Chome, Keishi-
kawa Machi, Bunkyo-Ku Tokyo
CABLE: SUDIJAP — JAPAN

VI. H O N G K O N G

1. **Central Overseas Corporation Ltd.**
Central Building Room No. 516B, 51
519, 521 8/8a
Queens Road Central and Pedder Stre
Hongkong
CABLE: CENOCHONG - HONGKONG
2. **Eastern Agencies Ltd.**
Central Building Rooms 323-325 Pedd
Street Hongkong,
CABLE: SUHONG — HONGKONG
3. **Yuda Niaga (Hongkong) Ltd.**
508 Shell House Queen's Road Centr
Hongkong
CABLE: YUNIAGA — HONGKONG

VII. S A N F R A N C I S C O

1. **Fatuma Incorporated**
World Trade Center Ferry Building S
Francisco
CABLE: FATUMA — SAN FRA
CISCO

REPRESENTATIVE PNN DI LUAR NEGERI

1. **M A N I L A**
5th Floor, Oledan Building Ayala A
nue, Makati Rizal Philippines
CABLE: PHILINDO MANILA
2. **PAKISTAN/KARACHI**
148-O. Block No. P.E.C.H. Society,
Karachi
3. **KOREA SELATAN/SEOUL**
c/o Jung Jin Industrial Co. Ltd. Se
Building Room 307 No. 6-2, 2-Ka, Hw
yon Dong Chung-Ku, Seoul
4. **Perwakilan Dharma Niaga GmbH di
geri Belanda**
Easternstraat 130 Amsterdam.
5. **INTRADE SPA. — ROMA**
Via SARDEGNA 40 Roma
CABLE: INITRA — ROMA

WARTA

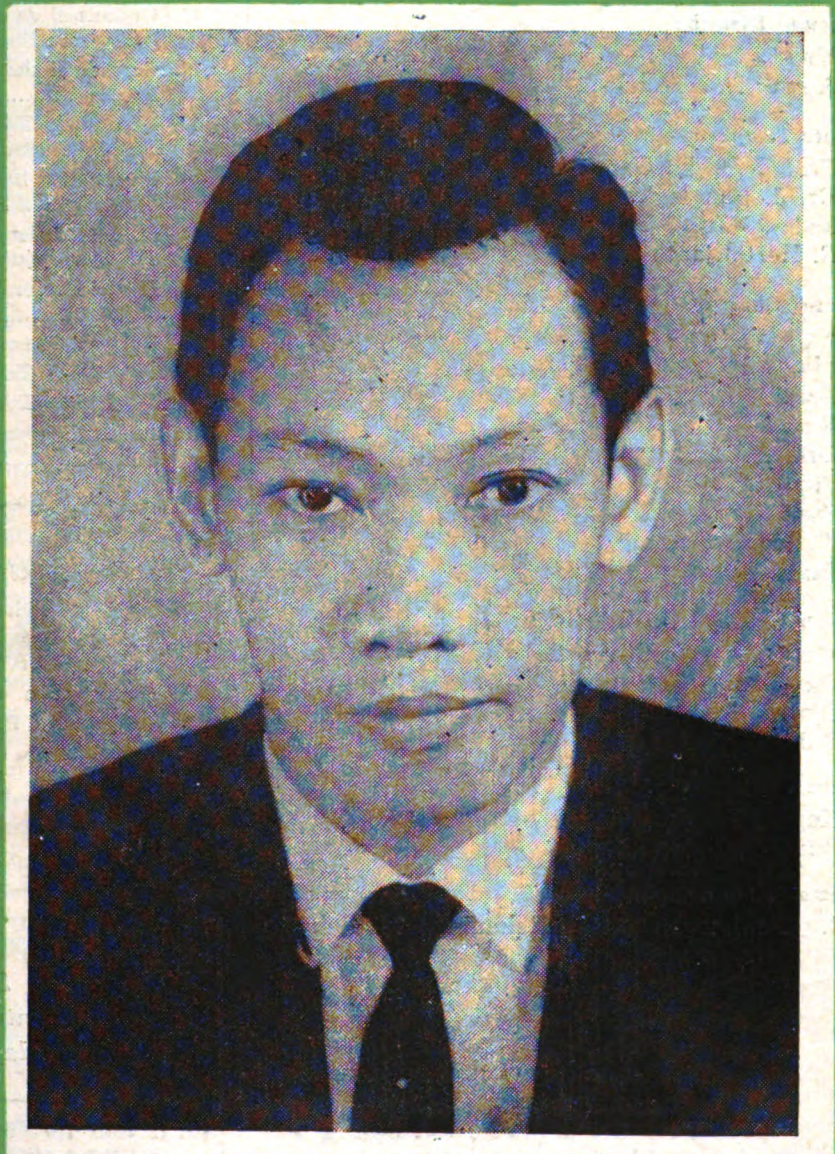


Perdagangan

RECEIVED
NOV 11 1966
UNIV. WIS. LIBRARY

AP
W299
P433

18
2



2

TAHUN KE - XVIII

5 MEI 1965

PP dan ketentuan²
pelaksanaannya pada
hal. 28 s/d hal. 34.

MADJALAH MINGGUAN „WARTA PERDAGANGAN”

Diterbitkan oleh :

Departemen Perdagangan Dalam Negeri
beserta Urusan Perdagangan Luar Negeri
dari Kompartimen Luar Negeri/H.E.L.N.
dan Perdagangan Luar Negeri.

Pelindung :

J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/
Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri
BRIG. DJENDERAL A. JUSUF.

Pemimpin Umum :

Kepala Direktorat Marketing dan Research :
Ir. J. J. Pitoy M.A. econ.

Staf Redaksi :

Staf Direktorat Marketing dan Research.

Penanggung Jawab :

Kepala Seksi Publikasi Madjalah
Anwar B. Harahap.

Pembantu Tetap :

Prof. Ir. Teko Sumodiwirjo
Dr. J. Panglaykim
Kolonel Jusuf Ramli
R. Hertatijanto S.H.

Pembantu² Khusus :

Kolonel Usman Ismail
Major Drs. Sukadjat
Zahar
R. Isa
Drs. A. Aidit
Suprpto
Sudjadi
A. Karim Usman S.H.
Dudy Djaya

Alamat Redaksi dan Tata Usaha :

Madjalah „WARTA PERDAGANGAN”
Direktorat Marketing dan Research
Djalan Tanah Abang Timur No. 87
D J A K A R T A

Pelaksana/Pertjetakan :

Kepala Pertjetakan P.N. Karya Tjotas
Burdi Reksodirdjo.

Pembayaran uang langganan dilakukan dimuka dengan :

1. Penjetoran atas Rekening Madjalah
„Warta Perdagangan” Kode No: KB/
W.A.-194, pada Bank Indonesia —
Dj: Thamrin, Djakarta.
2. Dinas Giro dan Tjek Pos atau dengan
pos wissel jang langsung dialamatkan
kepada Tata Usaha Warta Perdagangan
Direktorat Marketing dan Research.

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Kata Pengantar Redaksi	1
2. BERDIKARI (Bagian jang tidak diba- tjakan)	2
3. Ketetapan M.P.R.S. No. V/1965	9
4. Ketetapan M.P.R.S. No. VI/1965	11
5. Keputusan Presiden No. 71	15
6. Penjerahan tugas sementara kepada Soediro M.A., selama Menteri Brig. Djen. A. Jusuf diluar Negeri	16
7. Nama ² Anggauta Direksi P.N. Niaga ...	
8. Kepala ² Direktorat, Bagian, Seksi dalam lingkungan Urusan Perdagangan Luar Negeri	17
9. Pelantikan Anggota ² Direksi B.P.U. Niaga dan P.N. Niaga	
10. Organisasi dan Susunan Direktorat Mar- keting dan Research	22
11. Organisasi dan Susunan Direktorat Ekspor	25
12. Ketentuan ² Baru mengenai S.P.P. :	28
a). Ketentuan ² Pelaksanaannja	
b). Djenis ² barang jang dapat diimpor dengan S.P.P.	
c). Impor dengan S.P.P.	
d). Tjara djual beli S.P.P.	
13. Harga Penjerahan Barang ² Ekspor Gol. III	35
14. Delegasi Wewenang jang diberikan ke- pada Seksi Ekspor didaerah	36
15. Nilai Idjin Ekspor sementara Maret 1965	37
16. Harga ² Penjerahan Barang ² Ekspor Gol. I, II.	37

„WARTA PERDAGANGAN” No. 3

ISINJA ANTARA LAIN :

1. Laporan Pelelangan Tembakau di Bremen.....
2. Badan Pengawas Tertinggi dan Badan Penga-
was Harian P.T. PEKSIN
3. Perentjanaan dari BAPPENAS
4. Ketetapan M.P.R.S. No. VII dan No: VIII/1965
5. d.l.l.

Keterangan Gambar kulit muka :

SOEDIRO M.A.

*Pembantu utama Kuasa Menteri
Perdagangan Luar Negeri.*

Surat Izin terbit No. 21A/SK/UPPG/SIT-19
tanggal 17-4-1965.

Sebagai pelengkap dari Amanat Berdikari yang diutjapkan oleh P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS pada pembukaan Sidang Umum M.P.R.S. ke III tanggal 11 April 1965 yang dimuat dalam penerbitan yang lalu, dalam nomor ini kita mulai dengan menjadikan Amanat Berdikari P.J.M. Presiden yang tidak dibatjkan, kemudian disusul dengan Ketetapan M.P.R.S. No. V/MPRS/65 tentang Amanat Politik Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS yang berjudul "BERDIKARI" sebagai Penegasan Revolusi Indonesia Dalam Bidang Politik, Pedoman Pelaksanaan Manipol dan Landasan Program Perdjjoangan Rakjat Indonesia dan Ketetapan M.P.R.S. No. VI/MPRS/65 tentang Banting Stir untuk Berdiri Diatas Kaki Sendiri Dibidang Ekonomi dan Pembangunan.

Berhubung dengan tugas J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri keluar negeri, maka oleh beliau telah ditundjuk Sudiro M.A. Pembantu Utama Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri untuk mewakili J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri dalam menandatangani dan menjelesaikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan tugas Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri selama Menteri berada di luar negeri (terhitung mulai tanggal 8 Mei 1965).

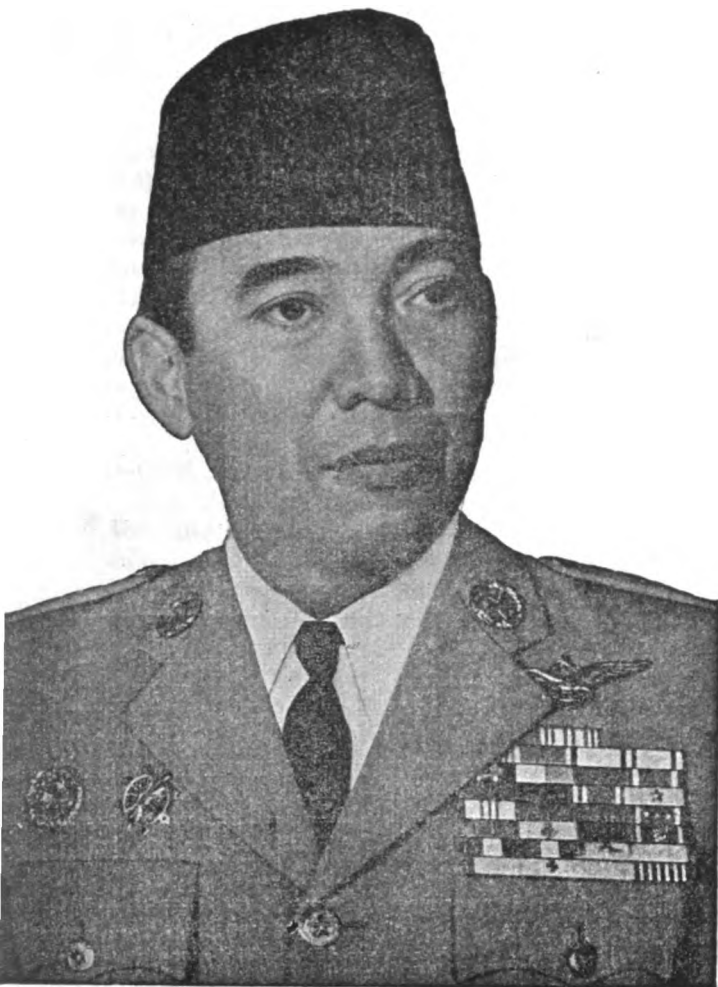
Dalam Gambar kulit madjalah ini diperkenalkan Sdr. Sudiro M.A. tersebut; dengan maksud yang sama dimuat nama-nama dari Kepala, Wakil Kepala/Kepala Bagian/Kepala Seksi dari Direktorat-Direktorat dan Sekretariat Umum dalam lingkungan Urusan Perdagangan Luar Negeri untuk diketahui oleh umum dalam melaksanakan prinsip "open management".

Kiranya upatjara pelantikan Presiden Direktur/Direktur-Direktur BPU-Niaga serta Presiden Direktur, Direktur² dari keenam Perusahaan² Niaga Negara, dimana Presidium Kabinet Dwikora lengkap berkenan memberikan amanatnja masing², adalah suatu peristiwa yang penting.

Organisasi dan Susunan dari Direktorat Marketing dan Research adalah organisasi yang ditundjuk oleh J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri untuk antara lain mengasuh dan menjelenggarakan madjalah Saudara ini: Direktorat Ekspor adalah Organisasi dari Urusan Perdagangan Luar Negeri yang melajani badan² usaha yang berketjimpung dalam usaha ekspor agar bersama-sama dengan Pemerintah mengusahakan tertjapainja target ekspor yang telah ditetapkan. Untuk memperlantjar dan menstimulir ekspor dari hasil² bumi/barang lemah dan dalam rangka dekonsentrasi management kedaerah, maka oleh Kepala Direktorat Ekspor telah diberikan wewenang penuh kepada Tjabang² Direktorat Ekspor didaerah untuk mengambil keputusan tentang harga penjerahan barang² ekspor tertentu itu.

"Banting stir" dalam bidang ketentuan² mengenai SPP (Surat Pendorong Produksi) ditjetuskan dengan keputusan Bersama Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri, sedangkan sebagai tindakan follow-upnja berturut-turut telah ditetapkan oleh Bank Indonesia: Tjara-tjara pendjualan dan pembelian SPP di Bursa (yang terpimpin); oleh Biro Lalu-Lintas Devisa: (Tjara² Impor dengan SPP) dan oleh Direktorat Impor: Djenis barang² yang dapat diimpor dengan SPP.

Achirnja dalam nomor ini dimuat harga² penjerahan barang² ekspor yang diumumkan oleh Biro Lalu-Lintas Devisa; dalam hubungan ini dijelaskan bahwa dikandung maksud untuk memuatnja setjara berkali sekedar untuk dapat melajani para pengusaha ekspor dalam rangka mengsucceskan export-drive yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai suatu Usaha Nasional (NATIONAL EFFORT) itu.



**AMANAT POLITIK PRESIDEN/PEMIMPIN
BESAR REVOLUSI/MANDATARIS MPRS**

pada pembukaan :

SIDANG UMUM M.P.R.S. KE III

tanggal 11 April 1965

— * —

**AMANAT PRESIDEN JANG TIDAK
DIBATJAKAN**

Saudara-saudara Anggota MPRS !

Sidang MPRS jang teramat penting ini telah termasuk dimasyarakat sebagai „sidang banting-stir”. Memang aku sengadja sebelum sidang ini berlangsung melantunkan gagasan banting-stir buat plan pembangunan kita chususnja, buat perekonomian kita umumnja. Dan aku bergembira, aku merasa puas bahwa gagasanku itu dalam waktu jang amat singkat telah difahami oleh Rakjat dan mendapat dukungan dari pers Manipolis dan dari pemuka² Nasakom, termasuk dari pimpinan MPRS.

Sebagai Mandataris MPRS, jang telah merapat dapat kepertjajaan jang se-besar²nja dari saudara² — untuk mana aku sekali lagi mengutjarkan banjak² terimakasih, ja, untuk mana sekali lagi akan berdjandji tidak akan menjia²kan kepertjajaan itu — sebagai Mandataris MPRS ha ini aku melemparkan-soalnja-keatas-medja, akan mengadjukan soalnja setjara resmi dan meminim kepada saudara² untuk setjara resmi pula menjatakan pendapat saudara² jang bebas : **setudjukah atau tidak setudjukah madjelis terting dalam Negara kita ini atas gagasan dan konsep saja banting-stir.**

Kalau seorang pemuda remadja mengindjaja usia 20 tahun dan pemuda itu tjinta kepada tanahairnja serta mendjadikan nasib tanahairnja nasibnja sendiri, maka biasanja mulai terbetuklah gagasan² dan fikiran²nja dalam wujud jang tegas. Aku sendiri merumuskan akupun Nasionalisme setjara tegas pada umur 20 tahun. Malahan — siapa orangnja jang tidak tahu ? — aku merumuskan akupunja konsepsi Nasakom jang sekarang kondang-kuntjara diseluruh djabat raja itu pada waktu aku pemuda belia berumur 25 tahun. Nah, Republik kita sekarang akan segera mengindjak usia 20 tahun. Bajankanlah pada kesempatan ini : berapa banjak pengalaman kehidupan, berapa banjak pahit getir dan asam-garam perdjjuangan jang tidak sudah kita peroleh ! Dengan tidak ragu² sedikit pun aku berani mengatakan bahwa 20 tahun Revolusi ini paling sedikit sama dengan 20 tahun zaman damai.

Pendeknja — kita sekarang sudah benar² dewasa, kita sekarang sudah benar² matang, kita sekarang sudah benar² memiliki segala sjar jang diperlukan untuk menjelesaikan tuntutan Revolusi Agustus kita sampai rampung.

Apa tuntutan² Revolusi kita itu ? Pendapat dan perkataanku bahkan sudah mendjadi fatnja Revolusi kita : bahwasanja, untuk kotruksi kita harus mendjalankan destruksi, untuk membangun kita harus mendjebol ! Indonesia ! buat ber-abad² lamanja mendjadi istananja imperialisme dan feodalisme. Istana lapuk itu sudah kita hantam, sudah kita gempur, tetapi belum 100% hantjur. Sudah kita lakukan pendjebol tetapi belum tertjabut sampai ke-akar²nja. A pernjataan se-akan² „kolonialisme sudah maku aku mendjawab : belum ! Maka dari itu, sepaku katakan pada tanggal 23-24 Maret jang didepan „kader² pelopor Marhaenis” : **monopoli asing harus dikikis habis dan kelebihan tanah harus dikikis habis !** Inilah sjar mutlaknja buat mengkontsruksi atau memban istana baru — istana kehidupan nasional demokratis, jang pada gilirannja merupakan rat mutlak pula untuk membangun kehidu jang lebih agung dan lebih indah lagi, ja Sosialisme Indonesia.

Aku bersyukur kepada Tuhan seru sekalian alam, bahwa kita tidak memerlukan waktu lebih dari 6 tahun — terhitung dari permakluman Manipol — untuk menamakan „Persoalan² pokok atau 5 persoalan pokok) Revolusi Indonesia” seperti diformulir oleh Manipol dan „Hukum² atau 6 hukum) Revolusi” seperti diformulir oleh Tavip sampai menjadi benar² satu pengerian, satu begrip. Siapa yang sekarang tidak meyakini bahwa Revolusi kita punya dua tahap dan bahwa imperialisme dan feodalisme itu merupakan rintangan² strategis yang harus dibabat pada tahap pertama?

Hakiki banting-stir adalah bahwa kita tidak boleh lagi mentolerir sikap, perbuatan dan tjarang atjak²an. Diwaktu Revolusi kita diliputi enjelewengan-penjelewengan, ja sudah tentu jalannja Revolusi itu atjak²an, malahan semojongan seperti djalannja seorang pemabok. Sekarang kita boleh berdebat soal metode dan soal stil, soal tjara dan soal gaja, tetapi kita tidak boleh berdebat lagi soal prinsip. Landasan kita sudah satu, dan landasan itu kokoh-kuat. Tujuan kita djuga satu, dan tujuan itu djelas-gas. Bahkan program kita sudah satu, dan program itu benar-tepat. Tekad kita djuga satu, dan tekad itu bulat-mantap. Soalnja sekarang bagaimana menarik peladjaran yang perlu-perlu dari pengalaman-pengalaman yang sukses maupun yang kurang sukses selama hampir 6 tahun, kalau dihitng dari Manipol, atau tepat 5 tahun, kalau dihitng dari Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana atau Ketetapan² MPRS No. 1 dan II tahun 1960. Selain menarik peladjaran dari pengalaman, kita djuga harus memperhatikan hadirnja faktor² baru.

Saja katakan „pengalaman² yang sukses maupun yang kurang sukses”, malahan, if you like, pengalaman² yang tidak sukses. Salah satu prerequisite bagi kaum Manipolis adalah reame. Kita harus realistis, kita harus berani melihat soal² sebagaimana adanja. Oleh sebab itu, **berhubung pengalaman-pengalaman yang lampau, kalau perlu kita mengadakan koreksi dan selfkoreksi, dan berhubung hadirnja faktor² baru, kalau perlu kita mengadakan adjustment, penyesuaian².**

Tjoba saudara² tangkap dengan tepat semangat terdapat andjuran² banting-stir. Andjuran ini tidak lain daripada **konsekwensi yang logis dari Tavip, konsekwensi yang logis dari tahun kita — tahun vivere pericoloso.** Kalau kita tidak banting-stir sekarang ini, yang hakekatnja kita djadinja tidak realistis, yang hakekatnja kita djadinja tidak berani njrempet² bahaya, maka kita akan hanjut dalam sleur, didalam arus routine. Tidak sadja itu! Kalau kita tidak banting-stir sekarang ini, hingga dengan demikian kita tidak melakukan koreksi atas kesalahan² kita dan tidak melakukan adjustments kepada faktor² yang baru, maka kita akan menjadi kaum keras-kepala, yang bagkali menarik didalam panggung sandiwara,

tetapi tidak banjak gunanja didalam panggung sedjarah!

Sebelum aku menggariskan pembantingan stir yang aku andjurkan, dan mengemukakan soal² yang dalam pendapatku harus mendapatkan pembahasan dan penjimpulan dari Sidang MPRS ini, baiklah aku adjukan **apa filsafat ekonomiku.** Kalau sidang ini membenarkan dan menyetujui filsafat ekonomiku, maka kuharap yang filsafat ekonomi itu akan mempedomani segenap bangsaku dalam memetjahkan segala masalah ekonomi, besar maupun ketjil. Terutama aku berharap yang filsafat ekonomi itu menjinari djalan bangsaku dalam mereka melaksanakan Dekon dan melaksanakan nantinja Plan² Ekonomi kita sesudah kita membanting stir. Filsafat ekonomiku adalah: **heaven-storming revolutionary spirit, combined with down-to earth handling of problems as they arise.**

Banting-stir adalah sesuai dengan filsafat ekonomiku itu. Sebab, soal ekonomi bukan pertama² soal administrasi, bukan per-tama² soal accountancy, apalagi soal birokrasi! Soal ekonomi adalah per-tama² soal **orientasi** soal **gerichtheid**, soal **kearahan**, atau **keterarahan.** Djika kita sebagai realis² berpidjak kepada bumi yang nyata, dan sebagai pedjuang² mempunjai orientasi yang tepat yang disertai semangat revolusioner yang laksana menjerbu suralaja, maka segala soal bisa kita petjahkan.

Lagipula, banting-stir itu tidak hanja dibidang ekonomi. Inilah sebabnja ketika membuka Seminar Angkatan Darat yang membitjarakan Doktrin Perang Revolusi kuamanatkan selaku Panglima Tertinggi ABRI bahwa djuga ABRI harus banting-stir dan bahwa banting-stir itu belum dilakukan sepenuhnya. Dalam amanatku itu yang kuutamakan adalah djuga soal gerichtheid, bahwa adanja ABRI itu sendiri (the very existence of our armed forces) adalah untuk melawan musuh dan bahwa musuh kita bukan sesuatu negara Sosialis atau negara² A-A yang termasuk kekuatan Nefo, melainkan nekolim. Disamping pembantingan stir dibidang ekonomi, djuga pembantingan stir dibidang pertahanan dan dibidang² lainnja kuharap saudara² pakukan didalam saudara² punya keputusan nanti.

Bidang kultur tidaklah terketjual. Tentang ini sudah banjak aku berbitjara dan aku berbahagia bahwa sembojan²ku sudah menjadi sembojan seluruh Rakjat: melenjapkan „textbook-thinking”, „Hollands denken”, „djiwa inlander”, „djiwa kintel”, „djiwa komprador”, „semangat djiplak”, „konservatisme”, dan lain², dan lain². Pernah aku mengatakan bahwa „every revolution has its twists and turns”, é, kok ada yang menjalah artikan lalu berkata” ”tiap revolusi harus pakai tari twist”... lalu mengembangbiakkan tari twist dan beetle dan segala matjam „kultur” dekadent a la imperialisme. Ini harus kita djebol, seperti segala „kultur” feodal dengan segala tachjul dan keterbelakangannja harus kita djebol dan

segala „kultur” komprador a la „Manikebu” harus kita djebol. Semua ini, djuga „BPS”, termasuk jang didalam Tavip aku sebut „rumput-pahit” atau „kempladcan”, bukan bunga, pendjebolannja mutlak perlu manakala kita benar² hendak membangun kebudayaan nasional jang berkepribadian, sesuai dengan „K”-nja USDEK.

Di Kairo, didepan rekan² sahabatku Kepala² Negara dan Pemerintah dari ber-puluh² negara dan didepan mata dunia jang ketika itu difocuskan ke „Konferensi non-blok ke-II” itu, aku karakterisir zaman kita ini sebagai „The era of confrontation”, **zaman konfrontasi**. Didalam pidatoku di Kairo itu dengan tandas kukatakan bahwa ko-existensi setjara damai hanja tjotjok buat negara² jang sudah arrive, tetapi tidak tjotjok buat negara² seperti kita ini jang masih ber-hadap²an dengan imperialisme dan mempunja misi sedjarah mengalahkan imperialisme. Filsafat ko-existensi setjara damai adalah filsafat arrive, sedang filsafat perjuangan kita adalah „for a fighting nation there is no journey's end”.

Di bidang ekonomi tak mungkin ada ko-existensi setjara damai, karena ekonomi jang berdiri diatas kiri sendiri tak mungkin ber-koeksistensi dengan ekonomi imperialis dan feodal. Di bidang politik tak mungkin ada ko-existensi setjara damai, karena politik jang sovereign dan bebas tak mungkin ber-koeksistensi dengan intervensi, subversi dan agresi nekolim. Di bidang **militer** tak mungkin ada ko-existensi setjara damai, karena militer jang mendjadi pandunja tanahair dan kemerdekaan tak mungkin ber-koeksistensi dengan global strategy imperialis. Di bidang **kebudajaan** tak mungkin ada ko-existensi setjara damai, karena kebudayaan jang berkepribadian nasional tak mungkin ber-koeksistensi dengan „humanisme universal” dengan segala variasinja. Di bidang **mental** tak mungkin ada ko-existensi setjara damai, karena tak mungkin seseorang mendjadi patriot dan komprador sekaligus!

Bersama saja datang ke Sidang Umum ke-III MPRS ini kawanku PM Republik Rakjat Demokratis Korea Kim Il Sung. Bagi Koreanja Kim Il Sung tak mungkin ada koeksistensi setjara damai, djuga tak mungkin ada „journey's end”. Separo dari Korea sekarang ini masih diduduki oleh pasukan-pasukan imperialis Amerika Serikat jang memakai bendera PBB, dan kita semua tahu bahwa dari sana tempo hari dikrimkan pasukan² bantuan kepada „PRRI-Permesta” dan sekarang kepada „Malaysia”. Tetapi walaupun separo Korea belum bebas, Koreanja PM Kim Il Sung bebas sebebas-bebasnja, lebih bebas daripada sementara negara formilnja wilajahnja meliputi seluruh neger. Djadi sama seperti kita: pada waktu ibukota kita di Jogjakarta, walaupun wilajah kita relatif sempit, tetapi sesungguhnya kita lebih bebas daripada ditahun 50-an, jang, walaupun wilajah lebih luas, tetapi kita dikungkung KMB. Korea dan Indonesia adalah dua negara jang penting² peranannja. Didalam

garis hidup imperialisme jang selalu kugambarkan membudjur dari Djabaltarik sampai ke Lautan Tiongkok, maka Indonesia ini, penting karena seperti halnja Suez, kita ini berada di simpang-djalan, sedang Korea djuga penting karena dia berada diujung terachir daripada garis-hidup imperialisme itu. Putusnja mataranta imperialisme di Korea, di Indonesia dan di Vietnam ditahun 1945, disusul oleh Tiongkok ditahun 1949, lalu disusul oleh jang lain² sampai pada kemerdekaan Aldjazair ditahun 1962, setjara **dialektis** merobah garis Djabaltarik-Lautan Tiongkok dari garis-hidup imperialisme mendjadi **garis-mati imperialisme!** Saja kagum akan hasil brilliant jang telah ditjapai Revolusi Rakjat Korea. Dan hasil² itu didapat djustru karena Korea bertekad berdiri diatas kaki sendiri, tidak mengemis² kepada siapapun, malahan **seperti** dalam **dialektisku mengatakan: djustru karena Korea dikepeng imperialisme**, dan bahkan — seperti halnja Republik Demokrasi Vietnam sekarang — diserang terus-menerus oleh Amerika Serikat. Maka itu aku tidak ajal sedikitpun akan kemenangan terachir Korea, seperti aku tak ajal sedikitpun akan kemenangan terachir Vietnam dan kemenangan terachir kita sendiri.

Alat² propaganda kaum imperialis tidak menjimpan² tenaga, waktu, pound sterling maupun dollar, untuk menghitamkan perjuangan kita. Mereka itu masih sadja minta dipertjaja bahwa „ekonomi Indonesia hampir ambruk” sedang „ekonomi Malaysia subur-makmur”; mereka itu masih sadja minta dipertjaja bahwa „Sukarno itu seorang expansionis”, sedang „armada Inggris, tentara Australia, tentara Selandia Baru dan tentara Amerika Serikat jang klinteran di depan pintu Indonesia itu bidadari² kemerdekaan dan perdamaian”. Mereka mentjoba menakuti² umat Agama dan Nasionalis kita dengan mengatakan „Sukarno itu Komunis”, Subandjo itu Komunis”, dan sebaliknya mentjoba menakuti² kaum Komunis kita dengan mengatakan „Sukarno itu dalam hatinja anti-Komunis”. Kita biarkanlah mereka itu mengotjeh, karena kalau tidak, dari mana propagandis² itu akan mendapat nafkahnja! Tetapi kalau dengan segala manouvre dan machinasinja, kaum imperialis mentjoba membelokkan perjuangan bangsa Indonesia, maka djawabku: **manakala matah sudah terbit dari Barat dan silam di Timur akan bisa membelokkan perjuangan kaum** Terus terang, Saudara², ada diantara was kaum imperialis itu jang mentjoba me-rajui² sa membudjuk saja, dan satu waktu malahan mentjoba membikin saja lupa-daratan dengan puasan² setinggi-langit jang irrasionil. Saja kasih melihat tuan² itu! Mereka kira saja ini apa. Memang aku telah saudara² angkat sebagai Presiden seumur hidup, memang aku telah saudara² tetapkan sebagai Pemimpin Besar Revolusi, tetapi sekedjappun aku tak pernah lupa akan filsafat hidupku sendiri bahwa aku ini

edar penjambung lidah Rakjat, bahwa tanpa Rakjat aku bukan apa².

Mendingan sekali apabila kaum imperialis itu membatasi diri pada propaganda dan fitnahan² saja. Kaum imperialis bukanlah kaum imperialis kalau tidak mengadakan sabotase² ekonomi. Mereka bersedia membayar pengkhianat² bangsa itu berapa saja, asalkan pengkhianat² itu mau menjalankan perintah² mereka untuk mensabotasi atau mensabot itu. Malahan di Hongkong dan Singapura sudah ada daftar tarif berapa harga jajan pembesar itu atau amtenar itu. Inilah sebabnya selalu aku mengatakan bahwa **soal ekonomi adalah juga soal kewaspadaan nasional**. Dalam hal ini kita juga harus menjebol dan membangun. Tanpa menumpas tukang² sabot ekonomi yang dikendalikan kaum imperialis, tak mungkin kita mentjiptakan iklim yang sehat untuk mempertumbuhkan perekonomian nasional kita.

Tiap² bangsa mempunyai persoalan² ekonominya sendiri². Ini benar untuk negeri² kapitalis dan juga benar untuk negeri² sosialis. Persoalan ekonomi yang kita hadapi masih banjak, tetapi imana didunia ini persoalan ekonomi bisa berchir? Bukankah pound sterling Inggris yang dianggap²kan stabilnya itu sekarang terpaksa harus direvaluasikan? Bukankah Amerika Serikat terus-menerus dipeningkan oleh jumlah kaum penganggur yang sekarang ini angkanja berisar sekitar 5 djuta orang? Bukankah Uni Soviet menghadapi masalah² yang tidak ringan di bidang pertanian dan di bidang mempertinggi produktivitet pada umumnja? Bukankah RRT menghadapi masalah² berat jaitu industrialisasi dan modernisasi.

Ada satu kerunia Tuhan s.w.t. yang ada pada kita dan yang tak ada pada banjak bangsa lainja, jaitu kekajaan alam kita. Sampai² orang mengatakan bahwa di Indonesia ini tongkatpun kalau ditantjapkan ketanah akan tumbuh..... di Korea, batu² sampai dirobah mendjadi tekstil, di samping membuktikan kelihaihan Rakjat Korea, djuga membuktikan bahwa alam Korea itu tidak sekaja alam kita. Tetapi ada diantara angkaku yang tak tahu berterimakasih dan tak malu diri, lalu mendjadi malas dan indolent oleh arena hidup dialam yang kaja. Kurang lebih 10 tahun j.l. ada kritik terhadap ajaran Karl Marx, yang menjatakan bahwa „kalau dalam sosialisme orang bekerdja menurut kemampuanja dan mendapat menurut prestasinja, dalam komunisme orang bekerdja menurut kemampuanja dan mendapat menurut kebutuhannja”. Para pengkritik itu, kalau orang diturutu kebutuhannja, manusia akan malas..... Tetapi Marx membantah kritik ini setjara wetenschappelijk. Oleh sebab itu, djika misalnja disesuatu negara sosialis ada kaum yang lebih mementingkan vansi, rekreasi, malahan pensiun, daripada mementingkan kerdja, maka sesungguhnya orang² itu mentjiderai Marxisme dan membenarkan

pengetjam² Marxisme. Tidak, Marxisme tidak salah, Marxisme djuga tidak absolute, maka itu Marxisme harus terus dipeladjar. Begitu djuga tidak salah, **samasekali tidak salah kalau aku mengatakan bahwa negeri yang alamnja kajaraja tidak perlu dan tidak boleh menjebakan manusia²nja malas dan indolent**. Aku tidak rela, aku tidak sudi kalau tjap „indolent” yang dialamatkan kepada kita oleh „ahli²” Belanda itu diberikan membenarannja oleh sebagian dari bangsa kita! Kalau di-waktu² j.a.d. masih terdapat sebagian dari bangsa kita yang malas²an, mereka itu — kalau mereka pegawai — harus diritul, dan kalau mereka bukan pegawai, mereka kudu disikat dan dikarbol. Ada rasialis² yang tidak suka melihat pengusaha² Tionghoa disini, tetapi harus diakui bahwa kebanyakan pengusaha² Tionghoa disini, itu dengan katok-kolor membanting-tulang siang dan malam, sedang diantara pengusaha² kita ada yang belum apa² sudah membeli bungalow dan „Impala” dan kerdjanja enak²an. Dengan mental burdjuis begini kita tidak bisa membangun, tidak mungkin! Kita harus anggap kerunia Tuhan s.w.t. berwujud alam yang laksana „rangkaihan zamrud dichatulistiwa” itu sebagai **challenge**, dan kita punja response harus kita wujudkan dalam **kerdja yang keras dan nantinja dalam masyarakat yang adil dan makmur. Hanja kalau kita sanggup memberikan response yang tepat begini, maka kita akan mendjadi bangsa yang besar!**

Dalam amanatku kepada Sidang Pembukaan MPRS yang pertama, 10 November 1960, sudah kukatakan bahwa „untuk mengachiri penderitaan, Rakjat Indonesia mendjalankan penderitaan”. Hal ini, kataku ketika itu, „tampaknja adalah satu paradox”, tetapi demikianlah kebenaran dialektika. Kita mempunyai kearifan yang mendalam sekali, yang diexpresikan oleh pantun:

Berakit-rakit ke hulu
Berenang-renang ketepian
Bersakit-sakit dahulu
Bersenang-senang kemudian.

Oleh sebab itu, sekalipun suasana kita suasana optimisme, sekalipun aku membentji sekali pesimisme, defaitisme, fatalisme, namun aku meminta kepada saudara² sekalian, kepada segenap pembantuku, kepada MPRS, DPR-GR, DPA, DPRD²-GR, Front Nasional, pemimpin² perusahaan-perusahaan negara, pemimpin² ABRI, ja, semua saja, tidak pakai ketjuali, untuk tetap bekerdja dalam **semangat keprihatinan**.

Memang „era” ini „era ambruknja imperialisme”, tetapi kalau kita tidak prihatin, dan kalau kita tidak mendjadikan „era” ini djuga „era konfrontas”, maka ambruknja imperialisme itu tidak akan datang, tidak akan!

Memang kemenangan kita atas „Malaysia” bukan soal lagi, kemenangan kita atas „Malaysia” itu tjuma soal waktu, tetapi kalau kita

tidak prihatin, dan kalau kita tidak mendjalankan Dwikora dengan kerandjangan, maka runtuhnya „Malaysia” itu tidak akan terdjadi, tidak akan!

Memang Indonesia kita dari Sabang sampai Merauke utuh dan bersatu, tetapi kalau kita tidak prihatin, dan kalau kita tidak menggembleng persatuan Nasakom, persatuan Nasakom disegala bidang, maka kemenangan terahir djuga tidak akan tertjapai, tidak akan!

Memang kerangka ketiga Manipol kita kian hari kian mentjapai hasil, tetapi kalau kita tidak prihatin, dan kalau kita tidak aktif se-aktifnja dalam setiakawan kita kepada Rakjat² Indotjina Rakjat Konggo, Rakjat Kuba dan Rakjat² lain, maka „dunia baru jang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menudju kepada perdamaian dunia jang sempurna” itu tidak akan terwujud, tidak akan!

Kesukaran keprihatinan ini kepada Manusia Indonesia. Entah sudah berapa kali aku mengatakan „tenslotte beslist de mens”. Dari sinilah keperluannja kita terus-menerus mengadakan indoktrinasi, sudah tentu indoktrinasi jang setia kepada garis² besar haluan negara dan segala pedoman pelaksanaannya. Aku jakin, bahwa mayoritas terbesar daripada Rakjat kita sanggup menerima, mengikuti mentaati dan melaksanakan Manipol. Disamping itu — aku, djuga tahu — bahwa tentu ada sebagian ketjil dari bangsa kita jang berkepalabatu; untuk mereka ini — maaf sadja! — **aku tidak punja obat lain selain rituling** — Seperti sudah kukatakan didalam Tavip: revolusi adalah rangkaian pandjang satu retuling kelain rituling.

Dulu teknik „decides everything”, sekarang manusia „decides everything”. Amerika Serikat misalnja, tekniknja sudah madju sekali, tetapi seberapa nilai manusia Negro disana? Sebaliknya, kita ini masih sadja disebut „underdeveloped”. Memang kita belum punja bom atom, tetapi **siapa berani bilang kita underdeveloped dalam kesadaran politik, dalam konsepsi², dalam tjita², dalam ideologi?**

Berbitjara tentang peranan manusia, ada lagi kerunia lain dari Tuhan s.w.t. jang tidak banjak terdapat pada bangsa² lain tetapi — sjukur alhamdulillah! — ada pada kita, jaitu djumlah manusia jang banjak. Malahan kita ini bangsa jang No. 5 besarnja didunia. Ketika di Peking aku bertanja apa masalah terpokok disana, pemimpin² RRT mendjawab: masalah memberi makanan kepada 700 djuta manusia. Memang dimana² sadja soal nomor wahid adalah soal sandang-pangan! Apakah bisa makan buat 700 djuta djiwa didjamin? Orang Tionghoa mengatakan „manusia itu mulutnja satu, tangannja dua; tentu dua bisa memberi makan kepada satu”. Memang, saudara², keterlaluhan kalau kita tidak bisa memetjahkan soal sandang-pangan! **Keterlaluhan kalau untuk ini sadja kita mesti menggantungkan diri kepada luarnegeri, mesti meng-**

harap²kan hutang dan „bantuan”, jaitu mesti mengemis!

Mengertikah saudara² sekarang mengapa saja mendjadi pengandjur azas **berdiri diatas kaki sendiri?** Memang pangan kita belum melimpah, tetapi aku berani memerintahkan stop import beras, djustru supaya kita tidak meng-enak², djustru supaya kita terdorong untuk berdiri diatas kaki sendiri. Djuga sandang kita belum melimpah-ruah, tetapi sampaipun tuas Ellsworth Bunker mengakui bahwa Rakjat Indonesia „well dressed”. Dan kalau aku perintahkan supaya tahun depan kita tidak mengimport tekstil maksudnja djuga supaya kita tidak meng-enak² supaya kita tidak menganggap „lumrah” bahwa pabrik² tekstil kita kerdja dengan kapasitas sepertiga, dan supaya pembangunan pabrik-pabrik tekstil baru diberi prioritas pertama.

Azas berdiri diatas kaki sendiri itu sebenarnya gagasanku sedjak dulu mula. Saudara² tentu ingat sembojanku „selfhelp” sebelum Perang Dunia II. Pada tahun 1932, didalam „Fikiran Rakjat”, aku mendjelaskan azas itu sbb: „Self help berarti: **jakin dan pertjaja** bahwa **djuga** zonder pertolongan orang lain bisa mentjapai maksud: azas selfhelp adalah pembunuh rasa kelemahan; dan supaya kepertjajaan atas ketjakangan sendiri itu makin mendalam, maka se-boleh² harus bekerdja sendiri. Tetapi dimana kepertjajaan itu tidak terganggu, maka bekerdja bersama dengan lain bangsa tidak mengapa. Apalagi kalau pekerdjaan bersama itu suatu keharusan, misalnja didalam perlawanan melawar internasional imperalisme, maka haruslah ia diusahakan. Segenap tak boleh mendjadi sebab kita mengurangi diri didalam lingkungan „Chinesche muur”.

Saja harap, sesudah pendjelasanku ini, baik kawan² didalam negeri maupun kawan² diluar negeri tidak akan salah-faham lagi mengenai azas kita „berdiri diatas kaki sendiri”.

Pengalaman kita belakangan ini memberi banyak pelajaran jang baik. Operasi pembersihan djalan² dan operasi kebersihan di Djakarta akhir ini membuktikan, bahwa asal ada kerdjaan jang baik antara Pemerintah dan Rakjat, bebas dari segala phobi²an, maka pekerdjaan jang berat dan sulit djuga bisa diatasi. Tidak pertjuma dikatakan didalam Manipol bahwa „tanpa bantuan seluruh Rakjat, Kabinet tidak mampu akan mentjapai hasil sedikitpun djuga”.

Sedari sekarang, aku harap, mobilisasi kekuatan Rakjat itu diteruskan, ja, dikembangkan. Aku ingin pada kesempatan ini memaklumkan „bersandar pada kekuatan Rakjat” sebagai azas kita bersama! Dalam konfrontasi, dalam pertjanduksi, dalam distribusi, kita harus bersandar pada kekuatan Rakjat!

Aku djuga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menekankan kepada segenap bangsa suatu wijsheid jang sederhana tetapi mendalam jaitu bahwa: **jang besar itu lahir dari jang ketjil**

Djanganlah kita mengabaikan jang ketjil², karena mau mengedjar jang besar. Djanganlah misalnja, karena sudah mulai membangun industri besar lalu mengabaikan keradjanan tangan Rakjat — keradjanan tangan jang merobah kaju, tanduk, tulang, penju, kima, kulit katjang, besi tua dan apa sadja lainnja mendjadi barang² berguna bagi kehidupan kita. Lagipula, dalam keradjanan tangan itu — termasuk batik dan pertunanan Rakjat — tersimpul kebudayaan kita jang agung. Djuga djangan misalnja mentang² sudah mengimport truk² dan alat² pengangkutan modern lainnja, lalu meremehkan grobak tjikar, sepeda, tongkang, dsb. Itu mengenai produksi dan transport. Mengenai distribusi, djangan karena ada badan ini atau badan itu, lalu tidak mengatjuhkan koperasi ketjil², dan djuga RK dan RT.

Beberapa waktu j.l. masih ada jang suka mengedjek Sukarno, karena aku membangun Monumen Nasional dan memerintahkan pembangunan gedung² jang besar². Malahan, njamuk² pers Barat jang berdatangan kemari sudah biasa mengadakan pertanjaan „berapa dikeluarkan Sukarno untuk tugu dilapangan Merdeka itu?“ Padahal, saudara², MPRS sudah sedjak lama merumuskan bahwa pembangunan kita tidak hanya materiil, tetapi djuga spirituil. Bagaimana kita membangun setjara spirituil, kalau kita tidak sanggup membangkitkan „begeesting“ didalam djiwa Rakjat kita? Lagipula, kita memelopori konsepsi persatuan Nefo, kita memelopori adanja Cenefo — bagaimana kita mendjalankan kepeloporan kita, djikalau kita kerdil djiwa, djikalau kita „kleinzielig“?

Saja tahu, bahwa diantara tukang² kritik ada jang mengadakan „alasan“ begini: tadinja, kesulitan² ekonomi — menurut tukang² kritik jang terhormat itu! — „disebabkan karena politik konfrontasi“; sesudah „kritik“ ini ditelanjangi sebagai hal jang reaksioner, mereka sekarang ganti „alasan“. Kata mereka: kesulitan² ekonomi, disebabkan „karena projek² nation building dan character building“. Aku mengusap lada! Moga² aku diberi Tuhan s.w.t. kesabaran dalam menghadapi anasir² demikian tadi! Dan saudara², kalau ditelaah benar², kaum itu sebenarnya kaum munafik. Mereka menjalahkan politik konfrontasi, tampaknya dari sudut kepeningtan tanahair, tetapi sesungguhnya mereka susah mendurhakai tanahair! Mereka mengetjam projek² nation building dan character building, api mereka sendiri hidup di-flat² indah dan di-unjallow² mewah, atas ongkos budget Negara lan padjak Rakjat!

Djangan hiraukan mereka! Biar kita madju erus, bekerdja, memeras otak dan keringat, lengan sembojan²: berdiri diatas kaki sendiri, bersandarkan kekuatan Rakjat, dan jang besar lahir dari jang ketjil!

Gotong-rojong harus mendjadi pengertian jang hidup, jang vital, jang dinamis. Aku bergembira bahwa diwaktu² kita ditimpa bentjana: bandjir, gempabumi, lahar, hama tikus, dll., Rakjat kita mengorganisir diri dan mengatasi tjobaan² itu dengan bergotong-rojong. Aku bersukahati bahwa untuk mengatasi masalah pangan, Rakjat kita mengadakan „gerakan 1001“ dengan menanami setiap djengkal tanah, halaman, pot², malahan di Gunung Kidul, di Wonogiri, Rakjat mengangkat tanah ke-gunung² batu dan merombak gunung² itu mendjadi sematjam „pot² alam“ jang produktif. Teruskan gerakan² itu, teruskan!

Gerakan² jang tampaknya „sepelè“ tetapi teramat penting itu, djuga membantu memperkokoh persatuan nasional bangsa kita. **Persatuan jang kokoh adalah persatuan jang lahir dari aksi.** Sudah tentu pertemuan-pertemuan untuk persatuan djuga penting, tetapi bertemuan² itu

sifatnja membantu, sedang jang pokok tetaplah persatuan jang lahir dari aksi. Dalam hubungan ini harus kita tjatat pertemuan Bogor, jang menghasilkan „Deklarasi Bogor“, jang diadakan atas inisiatifku dan jang kupimpin sendiri. Aku setudju dengan adanja suatu „tata-krama Nasakom“. **Di Indonesia, perkembangan Nasionalisme, perkembangan Agama, dan perkembangan Komunisme didjamin.** Ke-tiga² aliran itu harus bekerdjasama setjara rukun. Masing² tidak diperkenankan membitjarakan aliran jang lain setjara jang merugikan aliran lain itu. **Djuga propaganda anti-Nasionalisme, anti-Agama dan anti-Komunisme dilarang.**

Dalam pada itu, didalam masyarakat timbul berbagai bentrokan jang menjebabkan musuh² kita bersukaria. Djika bentrokan² itu disebabkan karena perbedaan ideologi se-mata², maka hal ini harus benar² ditjegah. Hampir 10 tahun j.l. aku sudah menjerukan djangan kita menganut „prinsipalisme“. Tiap² aliran harus menahan diri dan harus mendisiplin barisanja, menjdauhkan diri dari setiap teror²nja, apakah teror itu ditudjukan terhadap rapat, terhadap gedung, atau terhadap perorangan. Tetapi djika bentrokan itu disebabkan oleh karena ofensif Manipolis kita hendak di-halang²i, karena komando²ku hendak dirintang²i, karena pengganjangan nekolim hendak di-hambat², karena landreform hendak dipersulit, maka bentrokan itu tentu sadja sukar ditjegah. Hanja satu permintaanku, jaitu **supaja Rakjat Manipolis, jang sedang melangsungkan ofensif Manipolis, bekerdjasama se-erat²nja dengan alat² negara untuk meringkus reaksi dan kontra revolusi itu.** Kepada alat² negara, polisikah dia, AD-kah dia, AL-kah dia, AU-kah dia, djaksa-kah dia, Hakimkah dia, kepala daerahkah dia, aku minta **supaja mereka benar² memihak Rakjat.** Kita tidak hidup dizaman „trias politika“, ini bukan zamannja „netral²an“. Benar sekali Ketua Mahkamah Agung sdr. Wirjono Prodjodikoro jang menjatakan baru² ini bahwa hakim² harus membela kaum tani.

Baru² ini, saja telah mengadakan perubahan didalam susunan Kabinet Dwikora, jang saudara² semua tentu sudah maklum. Maksud daripada rituling itu tiada lain selain untuk menjapai efisiensi jang lebih besar. **Djika nanti ternjata efisiensi masih kurang, tentu saja akan lakukan rituling lagi, menurut keperluan tiap' ketika.**

Sebelum itu, politik jang saja gariskan, jang ternjata menggemparkan dunia, tetapi jang djuga menggugah kekaguman di-mana², adalah keputusan kita keluar dari PBB. Diluar negeri saja dituduh „keburu nafsu”, tetapi apa njatannya? Dari mana² datang permintaan, ja, permohonan supaya kita „masuk kembali ke PBB”. Saja tersenyum sadja, sebab **boleh djadi PBB tidak bisa hidup tanpa kita, tetapi kita bisa hidup tanpa PBB!** Djuga tidak keburu nafsu melainkan sudah saja pikir masak² kalau kukatakan: **mahkota kemerdekaan bukanlah keanggotaan PBB, melainkan berdiri diatas kaki sendiri!** Kalau PBB tidak mau meritul diri, dan kalau PBB tidak mau mengakui kesalahan²nja, maka pertjajalah — tjepat atau lambat, negara² lain djuga akan ada jang menjusul keluar dari PBB!

Sekarang, **apa itu banting-stir? Kenapa** kita mesti banting-stir? Dan **apa sjarat²nja** jang membikin kita boleh dan bisa banting-stir?

Per-tama² perlu saja tegaskan, bahwa banting-stir tidak berarti kita tidak setia kepada prinsip² kita sendiri, tidak berarti kita tidak setia kepada Dekon. Kalau ada banting-stir jang menjeleweng dari Dekon, aku adalah orang pertama jang akan melawannya. Tetapi dalam hal banting-stir jang djustru untuk mensukseskan Dekon, aku kini orang pertama jang mengandjurkannya. Pada tahun 1921, Lenin mengintrodusir „Ekonomi Politik Baru” jang terkenal sebagai „NEP”. Tidak berarti jang Lenin menjimpang dari Sosialisme, sebaliknya, dia mengadakan langkah itu **untuk mendjamin berhasilnja Sosialisme.** Pembanting-stir kita sekarang ini djuga tidak berarti kita menjimpang dari garis revolusi nasional-demokratis, sebaliknya, kita dituntut oleh keadaan untuk mendjamin kemenangan revolusi nasional-demokratis.

Kenapa kita mesti banting-stir? Seperti selalu kuperingatkan, didalam revolusi selalu ada dua matjam kesalahan, jaitu **reformisme dan „phasen-sprong”.** Jang penjakit reformisme, terutama meng-halangi² ekonomi sektor negara memegang dominasi, dan meng-halangi² landreform didjalkan setjara konsekwen, dus meng-halangi² revolusi nasional-demokratis. Jang penjakit „phasen-sprong”, terutama tidak mau mengikutsertakan modal swasta dan modal domestik, mau menegarakan segala sesuatu dan dengan demikian mau langsung ke Sosialisme”. Ke-dua² kesalahan ini kalau dibiarkan berbahaja sekali, karena dia bisa menggagalkan samasekali kita punja perjuangannya. Selain daripada itu, **ketika MPRS menetapkan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama, banjak**

faktor' jang belum dipertimbangkan dan ketika itu memang tidak mungkin dipertimbangkan, terutama faktor Trikora dan Dwikora.

Apa sjarat²nja untuk banting-stir? Kita sekarang berada presis di-tengah²nja Plan 8 Tahun kita. Empat tahun sudah dibelakang punggung kita. Selama 4 tahun ini sebagian dari Pola Pembangunan kita sudah terlaksana, sebagian lainnja belum. Selama 4 tahun ini banjak-banjak sekali pengalaman kita kumpulkan. Pengalaman manis, pengalaman pahit, djuga pengalaman setengah-manis-setengah-pahit. **Kemenangan² kita adalah guru kita jang baik, tetapi kegagalan² kita adalah guru jang lebih baik lagi.** Pada kita tjukup sjarat² untuk membanting-stir. Kita tak usah ragu²! Kita tak usah ragu² merevisi Plan 8 Tahun kita, karena ketakutan „meninggalkan sesuatu jang besar”. Ingatlah kepada Pascal jang pernah berkata: „De deugd van een mens moet niet gemeten worden naar zijn buitengewone verrichtingen maar naar zijn werken van alle dag”.

Kita harus merombak tjara berfikir kita! Kita harus meninggalkan sama sekali — sama sekali — fikir jang intinja masih menggantungkan diri dari luar negeri. Projek B didalam Plan Pembangunan 8 Tahun kita hakikinja masih menggantungkan diri luar negeri itu. Ini perlu kita rombak sama sekali! Kita harus benar² banting-stir dalam hal ini! Kita harus pertjaja kepada modal kita sendiri, kita harus mendasarkan diri pada apa² jang njata² kita miliki, jang bisa kita olah sendiri, bisa kita kembangkan sendiri, tanpa tergantung dari luar negeri manapun!

Seperti kukatakan didalam Dekon, maka harus „mengutamakan pertanian dan perkebunan dan mementingkan pertambangan”.

Dan seperti kukatakan didalam Tavip maka pertanian dan perkebunan adalah dasar, perindustrian adalah tulang-punggung perekonomian kita.

Pendeknja, komandoku banting-stir dalam rangka melaksanakan prinsip berdiri diatas kaki sendiri harus **berarti dipantjangkannya tiang² beton jang tjukup kuat untuk benar² membangun ekonomi nasional-demokratis ditahap sekarang dan ekonomi Sosialis ditahap nanti.**

Sekarang, sudah kurang lebih 90% dari perusahaan milik modal monopoli asing diambil-alih dan didjadikan milik negara, milik negara, dan ini merupakan pelaksanaan daripada fasal 3: UUD kita.

Tadinja, perusahaan² milik modal monopoli asing itu adalah alat untuk memeras Rakjat dan mengurus kekajaan alam kita. Sekarang, perusahaan² itu sudah ditangan kita dan kita harus benar² mendjadikan ekonomi sektor negara itu memegang commanding position. Ia harus benar mendjadi sumber utama dari penghasilan negara kita. Praktek² pentjolongan harus kita achiri

(bersambung ke hal. 10)

AMANAT POLITIK PRESIDEN/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/MANDATARIS MPRS JANG BERDJUDUL "BERDIKARI" SEBAGAI PENEGASAN REVOLUSI INDONESIA DALAM POLITIK, PEDOMAN PELAKSANAAN MANIPOL DAN LANDASAN PROGRAM PERDJOANGAN RAKJAT INDONESIA

(KETETAPAN MPRS No. V/1965)

M U K A D I M A H :

Bahwasanja berkat rachmat Tuhan Jang Maha Esa Rakjat Indonesia sekarang sedang dalam situasi Revolusioner melaksanakan ofensip revolusioner Manipolis melawan musuh² revolusi dari luar dan dalam negeri, terutama pengganjangan terhadap nekolim "Malaysia", jang dipaksakan oleh imperialisisme Inggeris, jang dibantu oleh imperialisisme Amerika Serikat jang djuga merupakan mata-rantai life-line of imperialism jang membentang dari selat Djibraltar melalui selat Sumatera sampai lautan Djepang serta sisa² kolonialisme/feodalisme.

Sedjalan dengan meningkatnja revolusi Indonesia, perlu dikikis habis pengaruh buruk/sisa² kebudayaan imperialis/feodalis dalam segala bentuk dan manifestasinja, dalam hubungannja dengan pembangunan kebudayaan nasional jang seluas²-nja.

Revolusi Indonesia mengikuti garis pertumbuhannja jang selalu meningkat terus-menerus, semakin tinggi menudju perwujudan tudjuannja jang sungguh besar. Dan pada masa ini Revolusi Indonesia sudah hampir selesai dengan tahapnja jang pertama ialah tahap nasional demokratis dan dengan demikian harus diselesaikan setepat-tepatnja, dan mulai memasuki tahapnja jang kedua ialah tahap Sosialisisme Indonesia berdasarkan Pantjasila.

Senafas dengan meningkatnja Revolusi Indonesia dalam menudju tertjiptanja Dunia Baru mengharuskan perombakan/banting stir dalam perentjanaaan dan pelaksanaan pembangunan atas dasar tuntutan² prinsip Dekon dan prinsip "Berdiri Diatas Kaki Sendiri" (BERDIKARI) sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.

Dengan perkembangan Revolusi Indonesia jang terus meningkat madju sekarang ini menundjukan lebih terkristalisasinja Pantjasila sebagai falsafah negara dan djuga semakin kokohnja dasar persatuan dan kesatuan Nasakom jang dalam djiwa dan watak persatuan — dan — kesatuan nasional progresif-revolusionernja adalah perasan daripada Pantjasila.

Konfrontasi jang terus menerus terhadap Nekolim dalam rangka mentjiptakan Dunia Baru mengharuskan peningkatan pembangunan Angkatan Bersendjata dalam hubungannja dengan penjempurnaan pertahanan/keamanan sesuai dengan tuntutan kebutuhan abad ke-XX. Garis perdjoangan Revolusi Indonesia jang telah dirintis dan digalang dalam Konperensi AA-I melalui Ganefo, Musjawarah Menteri AA., Konperensi Penulis AA., Konperensi Wartawan AA. Konperensi Islam AA., hidjrahnja Indonesia dari PBB dan lain² itu menundjukan tugas dan tanggung djawab Revolusi kita sebagai mertju-suar bagi perdjoangan Rakjat² Afrika-Asia dan Amerika Latin untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat diseluruh muka bumi.

Amanat politik Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara pada tanggal 11 April 1965 jang berdjudul "Berdikari" didepan Sidang Umum Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia ke-III mentjakup bidang politik jang makin meningkat dan pembantingan stir dalam djiwa dan alam pikiran serta kebidjaksanaan pembangunan. Maka Madjelis Permusjawaratan Rakjat dalam musjawarahnja pada tanggal 11 April 1965 s/d 16 April 1965 di Bandung dengan setjara bulat dan chidmat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pasal I.

Amanat Politik Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara pada tanggal 11 April 1965 jang berdjudul "Berdikari" didepan Sidang Umum Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ke-III sebagai :

(Sambungan hal. 8. Berdikari).

sekali dan se-lama²nja! Untuk ini, maka peng-integrasi-an konstruktif dan efektif antara Peme-rintah dan Rakjat jang terorganisasi jang ber-poroskan Nasakom harus benar² dilaksanakan.

Apabila ekonomi sektor negara sudah benar² memegang posisi komando, maka permainan spe-kulasi dan manipulasi ekonomi sektor swasta bisa diberantas, dan ini akan memungkinkan berkembangnja ekonomi sektor swasta setjara sehat, sebagai pembantu ekonomi sektor negara. Dengan demikian kita bisa mengutjapkan sela-mat tinggal kepada keliaran dan anarhi kapi-talis, dan kita bisa benar² memasuki sistim **eko-nomi terpimpin**.

Dalam hubungan ini, pengerahan funds and forces progresif seperti digariskan oleh Manipol dan dipertegas oleh Dekon, tidak akan terbatas pada pendaftaran kegiatan pengerahan modal se-mata, melainkan mentjiptakan iklim jang be-nar² favourable untuk bekerdja setjara produk-tif dan maximal, tanpa diskriminasi apapun.

Dengan demikian aku ingin jang setiap ke-ragu²an bisa kita berantas, kita basmi, dan se-bagai gantinya harus kita garandeer adanja ke-pertjajaan dan kejakinan kepada tenaga ekonomi dimasyarakat kita untuk bekerdja membantu pemerintah.

Pendeknja, dengan banting-stir sekarang ini kita harus mendjamin penggunaan maximal dari-pada semua alat produksi, semua modal, semua skill, semua knowhow, jang terdapat didalam negeri kita sendiri.

Kepada sekalian pembantuku, kepada MPRS, DPR-GR dan instansi² lain kuserukan supaya benar² memeras otak untuk mengatasi gejala² inflasi dan untuk membuang peraturan² kolonial atau setengah-kolonial jang masih mengikat ta-ngan dan kaki kita, dan untuk mentjiptakan pe-raturan² jang benar² nasional, jang bukannya mempersulit kita sendiri, mala²inkan memudah-kan usaha² kita.

Setelah 4 tahun berselang sedjak Plan Pem-bangunan kita kita djalankan, maka tahun ke-5 ini harus kita djadikan tahun penjesuaian kem-bali, sedang tahun ke-6 harus kita djadikan per-mulaan daripada Plan 3 Tahun jang baru, jang mungkin lebih sederhana daripada Plan 8 Tahun jang sekarang, tetapi lebih realistis, orientasi²nja tepat, dan samasekali bebas dari fikiran meng-gantungkan diri dari luarnegeri seperti Projek B jang lalu, dan dengan demikian benar² men-djamin berdiri diatas kaki sendiri untuk menje-lesaikan Revolusi nasional-demokratis sampai benar² selesai, sebagai sjarat mutlak untuk me-masuki alam Sosialisme.

Demikianlah, saudara² sekalian, prinsip² ban-ting-stir jang kuadjukan. Kuminta benar² supaya saudara² bersikap lapang-dada dalam menan-gapi usul²ku ini, kuminta supaya saudara² tidak ber-télé² dalam deliberasi² saudara² karena se-mua ini sesungguhnya sesuai dengan sembojanku sembojan kita bersama: Ambeg Paramarta.

Mari kita maju melompat, mari kita tinggalkan fikiran² kolot, mari kita banting-stir — ka-rena tidak ada kemungkinan lain, karena djalan lain jang lebih mudah dan lebih aman tidak ada

KETETAPAN MPRS NO. V

1. Penegasan dalam bidang politik mengenai Revolusi Indonesia pada tingkatnja sekarang, dan peranan Indonesia dalam perdjoangan membangun Dunia Baru;
2. Pedoman pelaksanaan haluan Negara Manipol;
3. Landasan program perdjoangan Rakjat Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebud-jaan, pertahanan/keamanan.

Pasal II

Kekuasaan penuh kepada Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Madjelis Permusjaw-ratan Rakjat Sementara untuk melaksanakan Ketetapan ini.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 16 April 1965.

P I M P I N A N MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

Ketua/Wakil Perdana Menteri III,
(Dr. Chairul Saleh).

Wakil Ketua/Menko,
(Ali Sastroamidjojo S.H.)
Wakil Ketua/Menko,
(D. N. Aidit).

Wakil Ketua/Menko,
(K.H. Idham Chalid).
Wakil Ketua/Menko,
(Maj. Djen. Wilujo Puspojudo

BANTING STIR UNTUK BERDIRI DIATAS KAKI SENDIRI DALAM BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

KETETAPAN M.P.R.S. No. VI/1965

Rapat Paripurna ke-2 tanggal 16 April 1965
Sidang Umum ke-III di Bandung,

Setelah membahas :

Amanat Politik/Paduka Jang Mulia Presiden/Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno pada Pembukaan Sidang Umum Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia ke-III tanggal 11 April 1965 jang berjudul „Berdikari” dan merupakan amanat Banting Stir.

Menimbang :

Bahwa untuk mendjadi djelas-terangnja obor api Revolusi Indonesia sebagai mertju-suar dalam perdjoangan dan pergulatan umat manusia menudju kepada pembentukan Dunia Baru melalui poros The New Emerging Forces, maka Rakjat Indonesia perlu mengambil keputusan dan menetapkan pendirian teguh dan tekad bulat dalam menghadapi perkembangan politik dan ekonomi Nasional dan International dewasa ini;

Bahwa untuk memenangkan Revolusi kita didalam kantjah perdjoangan mati²an menghadapi nekolim serta antek²nja sekarang, maka Negara dan Rakjat Indonesia harus melaksanakan Program Perdjuangan jang terdiri dari Pelaksanaan Dwikora serta tugas² politik lainnja dan pelaksanaan tugas ekonomi setjara sekali-gus;

Bahwa Revolusi Indonesia tahap Nasional Demokratis untuk mengkikis habis sisa² Imperialisme dan Feodalisme sudah hampir selesai untuk selandjutnja mulai memasuki tahap Sosialisme Indonesia berdasarkan Pantja Sila, maka Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana dalam pelaksanaannja perlu disesuaikan dengan perkembangan dan irama Revolusi dewasa ini dengan menjusun suatu program Ekonomi Perdjuangan;

Bahwa penjesuaian pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana dan pelaksanaannja harus berlandaskan pada gagasan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno seperti jang diamanatkan dalam Amanat „TAVIP” 17 Agustus 1964. Berdiri diatas kaki sendiri dibidang ekonomi dan pembangunan;

Bahwa perlu segera „Membanting Stir” dalam hal pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta Berentjana, Tahap Pertama 1961-1968 dan disesuaikan dengan perkembangan politik dalam dan luar negeri.

Mengingat :

1. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia No. II/MPRS/1960;
2. Resolusi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia No. 1/Rss/MPRS/1963;
3. Deklarasi Ekonomi;
4. Memorandum Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia tahun 1964 kepada Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia;
5. Amanat Paduka Jang Mulia Presiden tanggal 17 Agustus 1964 jang berjudul „TAVIP”.

MEMUTUSKAN :

1. Menjatakan menerima tanpa reserve Amanat Politik Presiden/Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia pada Pembukaan Sidang Umum ke-III tentang Banting Stir dibidang Ekonomi dan Pembangunan sebagai landasan dan pedoman pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta Berentjana untuk masa 3 tahun jang akan datang, jaitu sisa djangka waktu Tahapan Pertama mulai tahun 1966 s/d 1968 dengan landasan „Berdiri Diatas Kaki Sendiri” dalam ekonomi.
2. Menetapkan KETETAPAN TENTANG BANTING STIR UNTUK BERDIRI DIATAS KAKI SENDIRI DALAM BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN sebagai berikut :

BAB I.

GARIS² UMUM BANTING STIR TENTANG KEBIDJAKSANAAN DALAM PELAKSANAAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1.

PRINSIP BERDIRI DIATAS KAKI SENDIRI.

1. Prinsip „Berdiri diatas kaki sendiri” bagi Bangsa Indonesia berarti pertjaja pada kesanggupan dan kemampuan sendiri untuk memenuhi kebutuhan materiel spirituil/agama daripada Rakjat dengan menggunakan kekuatan sendiri sebagai sandaran.
2. Menggunakan kekuatan sendiri sebagai sandaran berarti berdiri diatas kekuatan² ekonomi jang riil dengan mendjadikan pertanian dan perkebunan sebagai dasar dan mengembangkan industri dalam negeri untuk didjadikan tulang-punggung dalam perkembangan ekonomi jang menguntungkan pembangunan negara. Untuk memperbesar

kekuatan ekonomi jang harus dipergiat usaha² untuk mengolah kekajaan alam dan bahan² mentah didalam negara sendiri.

3. Kekuatan ekonomi jang njata adalah :
 - a. Projek² Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia jang bersifat Nation dan Character Building baik jang merupakan pembangunan ekonomi maupun pembangunan mental/agama.
 - b. Tenaga kerdja rakjat Indonesia jang terdiri dari a.l. kaum buruh, tani, nelajan, dan Angkatan Bersendjata.
 - c. Unit² ekonomi negara termasuk jang dikuasai oleh daerah.
 - d. Projek² Pola Pembangunan Nasional jang sudah dimulai dan hampir selesai.
 - e. Unit² ekonomi koperasi.
 - f. Unit² ekonomi swasta jang progressif.

Pasal 2.

PROJEK-PROJEK PRIORITAS.

Dalam Kebidjaksanaan Pembangunan djangka pendek tersebut ditentukan Prioritas² dalam penjujukan dan pelaksanaan projek² sebagai tersebut dibawah ini :

- a. Projek Nation dan Character Building.
- b. Projek² dibidang produksi sandangpangan.
- c. Projek² Pembangunan Bidang Khusus Keamanan/Pertahanan jang meliputi projek² prasarana, industri pertahanan, dan projek² strategis, offensif, aerospace.
- d. Projek² Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Peternakan.
- e. Projek² Pertambangan, Industri dan Tenaga Listrik.
- f. Projek² Industri pengolahan bahan mentah.
- g. Projek² prasarana Nasional dibidang Perhubungan darat, Laut dan Udara dan Telekomunikasi serta industri² jang bersangkutan diantaranya Industri Bahari untuk kelengkapan pelajaran Rakjat.
- h. Projek² Transmigrasi Gaja Baru.
- i. Projek² Penelitian dan Pengembangan (Research and development) dibidang Teknologi, Industri, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Pertambangan dsb.nja.
- j. Projek² Pendidikan Tenaga Kcdjuran.
- k. Projek² Pola PNSB jang sudah dimulai.

Pasal 3.

Perlu diadakan imbangan jang tepat antara keperluan untuk mensukseskan tugas-politik dan tugas ekonomi berdasarkan penetapan prioritas jang mendjamin pelaksanaan Program Ekonomi Perdjjuangan

3 Tahun dalam mengatur :

- a. Pembagian Tenaga kerdja.
- b. Alokasi dana rupiah dan devisa.
- c. Supply barang-barang.
- d. Penjebaran projek² ke-daerah².

Pasal 4.

Menjusun satu Pola Pembangunan Nasional jang mengintegrasikan dan mensinchronisasikan projek-² PNSB, Mandataris, Daerah², Kopedasan, Irian Barat, serta manfaatkan Koperasi dan Swasta bagi Pola PNSB dibawah satu Pimpinan Pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 5.

IKLIM EKONOMI

1. Mentjiptakan iklim Ekonomi jang sesuai dengan kebutuhan Perdjjuangan dalam memperkuat ketahanan Revolusi menghadapi antjaman dan kepungan Nekolim serta antek²nja dengan mengadakan rehabilitasi harga dengan melaksanan politik harga jang berentjana; memberantas inflasi dengan mentjiptakan ongkos produksi jang stabil berdasarkan plan produksi jang konkrit di-unit² produksi, dan meletakkan dasar² jang kuat guna perentjanaan pembangunan berikutnya. Menertibkan ongkos² sirkulasi barang dagangan dengan terutama memberantas ongkos gelap; meningkatkan daja beli rakjat.
2. Melaksanakan setjara konsekwen UUPA, UUBH dan undang² bagi hasil Perikanan jang menguntungkan kaum tani-penggarap nelajan pekerdja.

BAB II.

KEBIDJAKSANAAN DALAM BIDANG PEMBIAJAHAN.

Pasal 6.

1. Sumber pembiajaan bagi Pembangunan Nasional Semesta Berentjana ini pertama-tama harus usahakan atas dasar kekuatan dalam negeri sendiri dengan mengerahkan semua modal dan potensi (funds and forces) jang progressif, dengan sedjauh mungkin tidak menambah beban rakyat.
2. Sistim projek B jang menggantungkan diri pada investasi modal asing dihapuskan.
3. Pembiajaan pembangunan didasarkan atas kekuatan dan kemampuan jang kita miliki sendiri ialah usaha² dari :
 - a. Unit² ekonomi negara; b. rakjat pekerdja buruh tani, nelajan dan Angkatan Bersendjata; c. koperasi dan d. swasta progressif.
4. Harus ditjiptakan sjarat² cost-accounting jang manipolis jaitu berdasarkan management jang effesient dengan memberantas salah urus dan pemborosan material, uang, tenaga dan waktu.

Pasal 7.

1. Hasil pengolahan kekajaan alam (bumi, laut dan udara) seperti Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Pertambangan dijadikan sumber utama bagi pembiajaan pembangunan.

2. Menggali sumber² pembiayaan baru dengan terlebih dahulu mengadakan pra-investasi untuk projek² yang segera menghasilkan.
3. Meningkatkan Ilmu Pengetahuan dan mempergiat penelitian (research) dari bahan² kekayaan alam untuk melipat gandakan kualitas dan kuantitas produksi.
4. Mempertinggi kegairahan dan keahlian tenaga kerja.

Pasal 8.

1. Dalam memetjahkan problem pembiayaan pembangunan Daerah perlu diberikan wewenang yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dengan DPRD) dalam rangka satu kesatuan ekonomi nasional yang prinsip²nja perlu ditetapkan dengan undang².
2. Pemerintah pusat mengambil langkah² yang mendjamin keseimbangan kemajuan ekonomi antar daerah dengan membantu lebih banjak kepada Daerah² yang kurang berkembang.

Pasal 9.

1. Para pengusaha Swasta dilarang melakukan import, ketjuali djika mereka mengimport atas nama Pemerintah.
2. Dibidang export, Swasta² hanya diberi izin untuk berusaha mendjadi produsen-exportir, yang exportnja harus dilakukan dibawah pimpinan Pemerintah.

Pasal 10.

Melaksanakan nasionalisasi dan bila perlu men-sita semua perusahaan asing yang bermusuhan, hingga tertjapai kebebasan penuh dibidang ekonomi.

Pasal 11.

Inflasi dihentikan setjara ber-angsur² melalui berentjanaan perkembangan harga, produksi dan distribusi.

Pasal 12.

Projek² pembangunan dibiakai dari Anggaran Pembangunan Negara yang dikuasai langsung oleh residen/Mandataris MPRS.

Pasal 13.

- Pengerahan "funds and forces" swasta yang progresif baik nasional maupun domestik dieffektifkan, terutama dibidang produksi.
- Iklim yang baik bagi usaha² dibidang produksi ditjptakan dengan menghilangkan segala hambatan dalam per-izinan dan fasilitas² lainnja.

Pasal 14.

1. Sesuai dengan azas berdiri diatas kaki sendiri dan untuk melindungi industri dalam negeri, maka pembelian barang² dari luar negeri hanya dilakukan djika tidak dapat dibuat sendiri dalam djumlah yang mentjukupi kebutuhan didalam negeri.
2. Penggunaan devisa hasil ekspor dan atau kredit ditudjukan untuk memperkuat produksi dalam negeri.

Pasal 15.

Penghematan diadakan setjara besar²an umumnja pada bidang² yang non produktif.

Pasal 16.

Prosedur penjaluran pembiayaan pembangunan disederhanakan dan dipermudah dengan mensjaratkan pertanggung jawaban dari pelaksana projek.

Pasal 17.

Untuk melaksanakan kebidaksanaan pembiayaan pembangunan disusun anggaran moneter berdasarkan perhitungan² ekonomis yang mendjamin kenaikan produksi dan tarap penghidupan rakjat dengan komponen-komponen sebagai berikut :

- a. anggaran routine
- b. anggaran pembangunan
- c. anggaran devisa
- d. anggaran kredit
- e. anggaran khusus.

BAB III.

ORGANISASI PELAKSANAAN.

Pasal 18.

Bidang organisasi pelaksanaan pembangunan meliputi hal² sebagai berikut :

- a. Aparatur penetapan policy pelaksanaan pembangunan dipusat yang memusat dan berentjana.
- b. Aparatur penjelenggaraan pembangunan dipusat dan didaerah.
- c. Aparatur pengawasan pembangunan dipusat dan didaerah.

Pasal 19.

1. Untuk mensukseskan Pembangunan djangka pendek, untuk mempertinggi kemampuan aparat pelaksanaan Pembangunan, untuk meningkatkan effisiensi dalam management serta mentjegah kesimpang-siuran wewenang dalam policy ekonomi dan mendjamin kesatuan dalam Pembangunan Ekonomi dibentuk Dewan Pimpinan Ekonomi Nasional (Depenas) yang langsung dipimpin oleh Presiden/Mandataris MPRS.

2. Tugas Dewan Pimpinan Ekonomi Nasional ini ialah memberi bimbingan dan pimpinan pelaksanaan, pengaturan pembiajan dan pengawasan Pembangunan.
3. Badan², lembaga² dan Instansi² Pemerintah jang mempunyai wewenang jang sama atau serupa, ditiadakan dan selandjutnja wewenang, tugas dan kewajibannja diintegrasikan didalam Dewan Pimpinan Ekonomi Nasional.
4. Untuk lebih mendjamin adanja social support dan social control, golongan masyarakat berporoskan NASAKOM didudukkan dalam Dewan Pimpinan Ekonomi Nasional.
5. Tentang susunan, tugas serta wewenang dari Dewan Pimpinan Ekonomi Nasional, setjara terperintji ditentukan oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS.

Pasal 20.

1. Hubungan antara aparaturnya Pusat dan Daerah disegala bidang disederhanakan dan diperlantjar.
2. Peranan Daerah dibidang Pembangunan diperbesar.
3. Pemerintah Daerah memimpin langsung pelaksanaan Pola Pembangunan Daerah, melakukan koordinasi dan membantu pengawasan pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional jang berada didaerahnja.

Pasal 21.

1. Kebidaksanaan pelaksanaan Banting Stir jang garis² besarnya ditetapkan oleh MPRS diserahkan kepada Mandataris untuk selandjutnja disusun Pola Ekonomi Perdjuaan setjara terperintji oleh MUPPENAS/BAPPENAS selambat²-nja sudah selesai sebelum tahun 1965.
2. Pola Pembangunan Daerah disusun oleh BAKOPDA dan ditetapkan oleh BAPPENAS/MUPPENAS.

Pasal 22.

1. Melaksanakan demokratisasi dalam management dengan merealisasikan social control, social-support, social participation dalam rangka merealisasikan social responsibility.
2. Menjehatkan dan menertibkan aparaturnya ekonomi dan pembangunan untuk menjapai efisiensi dan effectiviteit dengan lebih menempatkan serta meningkatkan ekonomi sektor negara dalam leading dan commanding position.
3. Mengadakan inventarisasi kekayaan negara dengan teliti.
4. Memberantas birokrasi, manipulasi dan korupsi.
5. Membersihkan kaum kapitalis-birokrat subversi dan kontra revolusi dari aparaturnya Ekonomi dan Pembangunan.
6. Mengikuti sertakan Front Nasional dalam pelaksanaan tugas² dalam pasal ini.

Pasal 23.

Mentjiptakan iklim politik jang sesuai dengan kebidaksanaan Banting Stir dalam Pembangunan dengan memperkuat dan menjempurnakan team pembantu Presiden dengan tenaga² jang Pantjasilais dan Manipolis sedjati berporoskan Nasakom.

Pasal 24.

Disamping Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Mental/Agama dalam rangka Nation and Character Building, termasuk indoktrinasi kebudayaan, olahraga serta pembangunan khusus Angkatan Bersenjata tetap diteruskan. Pembangunan Angkatan Bersenjata sebagai alat Revolusi dan sebagai alat keamanan/pertahanan harus seirama dan sesuai dengan peningkatkan Revolusi Indonesia.

BAB IV.

PENUTUP

Pasal 25.

Memberikan kekuasaan penuh kepada Presiden Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno untuk melaksanakan Ketetapan ini.

Ditetapkan di Bandung
Tanggal: 16 April 1965.

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

Ketua/Wakil Perdana Menteri III,
(Dr. Chairul Saleh).

Wakil Ketua/Menko
(Ali Sastroamidjojo S.H.)

Wakil Ketua/Menko
(D. N. Aidit).

Wakil Ketua/Menko
(K.H. Idham Chalid)

Wakil Ketua/Menko
Maj. Djen. Wilujo Puspojo

**PENGANGKATAN BRIG. DJEN. ACHMAD JUSUF MENDJADI MENTERI
PERDAGANGAN DALAM NEGERI DISAMPING SEBAGAI KUASA
MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 71 TAHUN 1965**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa untuk mempertinggi efisiensi susunan Kabinet Dwikora dan intensifikasi daripada penggalan potensi masyarakat dan kekayaan alam serta pelaksanaan daripada "pembantingan stir" dibidang Ekonomi Negara Indonesia yang berpedoman pada Deklarasi Ekonomi, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan/penambahan terhadap susunan Kabinet yang sekarang ;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk :
 1. Mengangkat seorang Menteri Koordinator yang bertugas dibidang pelaksanaan Ekonomi Terpimpin.
 2. Membagi Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan yang termasuk lingkungan Kompartimen Pembangunan menjadi 3 (tiga) Departemen.
 3. Mengadakan pergeseran jabatan Menteri Perhubungan Udara.

Meningat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No. 215 dan 228 tahun 1964.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Membebaskan dengan hormat Sdr. ADAM ALIK dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan dan selanjutnya mengangkatnya menjadi Menteri Koordinator PELAKSANAAN EKONOMI TERPIMPIN yang berada langsung bawah Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dan menerima instruksi-instruksi melalui Presidium Kabinet Dwikora.

EDUA :

Mengangkat Sdr. Brig. Djen. ACHMAD JUSUF menjadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri yang termasuk dalam lingkungan Kompartimen distribusi, dengan catatan bahwa disamping jabatannya sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri ia tetap menjadi sebagai Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri.

KETIGA :

- a. Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan yang berada dalam lingkungan Kompartimen Pembangunan dibagi menjadi 3 (tiga) Departemen yang terdiri dari :
 1. Departemen Urusan Minyak dan Gas Bumi.
 2. Departemen Pertambangan.
 3. Departemen Perindustrian.
- b. Mengangkat :
 1. Sdr. Dr. CHAIRUL SALEH Wakil Perdana Menteri III/Menteri Koordinator Pembangunan — menjadi Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi.
 2. Sdr. ARMUNANTO — menjadi Menteri Pertambangan.
 3. Sdr. HADI THAJEB — menjadi Menteri Perindustrian Dasar.
- c. Ketiga Departemen tersebut diatas tetap berada dalam lingkungan Kompartimen Pembangunan.

KEEMPAT :

- a. Memberhentikan dengan hormat Laksamana Muda Udara ISKANDAR dari jabatannya sebagai Menteri Perhubungan Udara dengan utjapan terimakasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan terhadap Negara ;
- b. Mengangkat Sdr. PARTONO, Presiden Direktur P.N. GARUDA, menjadi Menteri Perhubungan Udara.

KELIMA :

Mengangkat Major Djendral dokter IBNU SUTOWO menjadi Menteri diperbantukan pada Presidium dengan tugas membantu Wakil Perdana Menteri III dalam pelaksanaan kebijaksanaan mengenai perindustrian dan pertambangan Minyak dan Gas Bumi, disamping jabatannya sekarang sebagai Presiden Direktur P.N. "PERMINA".

KEENAM :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Maret 1965

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

Penjerahan tugas sementara kepada *S o e d i r o M.A.* selama Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri di Luar Negeri

Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri No. 043/MPDN/SK/65 Th. 1965, tgl. 8-5-1965.

**MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
MENIMBANG :**

bahwa berhubung dengan tugas kami keluar negeri, maka selama berada diluar negeri dipandang perlu untuk menundjuk seorang pedjabat jang akan menjelesaikan segala sesuatu jang bersangkutan dengan tugas Departemen Perdagangan Dalam Negeri/ Urusan Perdagangan Luar Negeri;

MENINGAT :

1. Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1965 tanggal 18 Maret 1965.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 1965 tanggal 30 Maret 1965.
3. Surat Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 021/4/MPLN/SK/65 tanggal 15 April 1965.

MEMUTUSKAN :

Pertama : Menundjuk *Sdr. Soediro M.A.*, Pembantu Utama Kuasa Menteri Perdagangan Luar

Negeri untuk mewakili kami dalam menanda-tangani dan menjelesaikan segala sesuatu jang bersangkutan dengan tugas Departemen Perdagangan Dalam Negeri, Urusan Perdagangan Luar Negeri selama kami berada diluar negeri;

Kedua : Bila terdapat kesalahan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perobahan seperlunya;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : **D j a k a r t a**
Pada tanggal : **8 Mei 1965.**

**MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
KUASA MENTERI PERDAGANGAN
LUAR NEGERI,**

A. YUSUF

(Brig. Djendral T.N.I.)

SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI P.N.-NIAGA JANG BARU

N A M A	D J A B A T A N
P.N. ADUMA NIAGA	
1. Kom. Bes. Amir Dt. Palindih S.H.	Pd. Pres. Direktur
2. Ronda Saroenggalo S.H.	Pd. Direktur
3. Husein Prawiradirdja	Pd. Direktur
4. Abd. Hamid S.A., S.H.	Pd. Direktur
P.N. ANEKA NIAGA	
1. Maj. Djukardi Odang S.H.	Pd. Pres. Direktur
2. Isa Danubrata	Pd. Direktur
3. Drs. Sudarmo	Pd. Direktur
4. Purbokusumo	Pd. Direktur
P.N. DARMA NIAGA	
1. Let. Kol. Abu Sadikin	Pd. Pres. Direktur
2. Ir. D. Ardisasmita	Pd. Direktur
3. Drs. Suherdy	Pd. Direktur
P.N. PANTJA NIAGA	
1. Teuku Moh. Daud	Pd. Pres. Direktur
2. S u k a r n a	Pd. Direktur
3. Abdurachman Nawawi	Pd. Direktur
4. Abdullah Jatim	Pd. Direktur
P.N. PEMBANGUNAN NIAGA	
1. Soekadrie Surjoatmodjo	Pd. Pres. Direktur
2. Drs. J. Idhat	Pd. Direktur
3. Drs. Basmar Rachman	Pd. Direktur
4. Ir. Singgih	Pd. Direktur
P.N. SATYA NIAGA	
1. J.B. Tititheru	Pd. Pres. Direktur
2. Drs. R. Permanu	Pd. Direktur
3. Junus Wirasmo	Pd. Direktur

KEPALA, WAKIL-KEPALA, KEPALA-BAGIAN dan KEPALA-KEPALA SEKSI dari DIREKTORAT-DIREKTORAT DALAM LINGKUNGAN URUSAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI.

I SEKRETARIAT UMUM LUAR NEGERI.

1. Kepala Sekretariat Umum : S. Muljo S.H.
2. Kepala Bagian Umum : Arsad Libuy S.H.
3. Wakil Kepala Bagian Umum : Pintadi
4. Kepala Seksi Urusan Pegawai : Soewandhi
5. Kepala Seksi Urusan Keuangan : Slamet
6. Kepala Seksi R.T./Kesedjahteraan : Asikin
7. Kepala Seksi Arsip/Ekspedisi/Dokumen : Hidajat Mahbub B.A.
8. Kepala Bagian Khusus : Ibnu Hatta
9. Wakil Kepala Bagian Khusus : S.M. Sinaga
10. Kepala Seksi I : Drs. Frans Siauw Tek Liang
11. Kepala Seksi II : Sajid Prijohutomo

II DIREKTORAT HUBUNGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI.

1. Kepala Direktorat : R.M. Tjokro Santoso
2. Wakil Kepala Direktorat : Harmiel Sonda
3. Kepala Bagian Tata-Usaha : Taibur Rahman B.A.
4. Kepala Seksi Hukum Pengakuan : M. Luth
5. Kepala Seksi Keuangan : Pramono
6. Kepala Seksi Urusan Pegawai : R. Radjiman
7. Kepala Seksi Arsip : Sardjono Asmari
8. Kepala Bagian Hubungan Antar Negara : A.B. Gaffar
9. Kepala Seksi I : Harry Harjono B.A.
10. Kepala Seksi II : Z. Hutagalung B.A.
11. Kepala Seksi III : Moch. Soetomo
12. Kepala Bagian Kerdjasama Antar Negara : Drs. Wirjaman
13. Kepala Seksi Kerdja sama Internasional : Soejono Soerjoatmodjo B.A.
14. Kepala Seksi Commodities : (Sementara dirangkap oleh Kepala Bagian)
15. Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan : Soelarjo Mangkudipuro B.A.

III DIREKTORAT IMPORT

1. Kepala Direktorat : Drs. Tuwaidan
2. Wakil Kepala Direktorat/Kepala Bagian Umum dan Pelaksanaan : Drs. M.S. Siregar
3. Kepala Seksi Pendjataan : Sumantri
4. Kepala Seksi Hukum Pengakuan : Noesjirwan S.H.
5. Kepala Seksi Penggolongan barang : R.P. Soeptandar
6. Kepala Seksi Tata Usaha : Sukandi
7. Kepala Bagian Perantjanaan, Programming Dan Pengawasan : Moertopo
8. Kepala Seksi Planning dan Programming : Drs. Kamiludin Tahar
9. Seksi Realisasi : S.M. Latumeten
10. Kepala Seksi Pengawasan Umum : A.N. Pantow
11. Kepala Seksi Daerah : A. Amin

IV DIREKTORAT EKSPOR.

1. Kepala Direktorat : Alamsjah
2. Wakil Kepala Direktorat : Drs. Suhaemi
3. 1. Kepala Bagian Perentjanaan Programming dan Pengawasan Harga : Drs. Handoko Talogo
2. Wakil Kepala Bagian Perentjanaan Programming Dan Pengawasan : K.M. Badarudin

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 4. Kepala Seksi I | : R. Setiardjo |
| 5. Kepala Seksi II | : A.H. Lunowa |
| 6. Kepala Seksi III | : R. Asmoro |
| 7. Kepala Seksi IV | : Moh. Jusuf |
| 8. Kepala Bagian Tata Usaha | : Hadisunarjo |
| 9. Kepala Seksi Urusan Pegawai | : S. Hardjosoemarno |
| 10. Kepala Seksi Keuangan | : R. Soeroto |
| 11. Kepala Seksi Umum/Rumah Tangga | : M. Mahmud |
| 12. Kepala Seksi Arsip dan Ekspedisi | : Abdullah Ismail |

V. DIREKTORAT MARKETING DAN RESEARCH

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Kepala Direktorat | : Ir. J.J. Pitoy M.A. Econ |
| 2. Wakil Kepala Direktorat | : E.R. Wakary |
| 3. Kepala Bagian Marketing Research Planning Dan Programming | : Sukardjono B.B.A. |
| 4. Kepala Seksi Research/Statistik | : Drs. Moertriantoro |
| 5. Kepala Seksi Planning/Program | : (Dirangkap oleh Kepala Bagian) |
| 6. Kepala Seksi Pengawasan Perwakilan DIMAR | : Drs. B. Sitompul |
| 7. Kepala Bagian International Trade Information Service | : Ir. A. Didi Abdurachman |
| 8. Kepala Seksi Publikasi | : Anwar B. Harahap |
| 9. Kepala Seksi Dokumentasi dan perpustakaan | : (Dirangkap oleh Kepala Bagian) |
| 10. Kepala Seksi Penerangan | : Tan Kristanto |
| 11. Kepala Bagian International Trade Promotion | : Drs. Moetojo |
| 12. Kepala Seksi Propaganda | : Drs. Nukman |
| 13. Kepala Seksi Organisasi International | : Herman Ratu |
| 14. Kepala Seksi Pameran | : Dra. Koestarinah |
| 15. Kepala Bagian Standardisasi Dan Normalisasi | : Drs. Darwis Umar |
| 16. Kepala Seksi Organisasi Dan Teknis Marketing | : (Dirangkap oleh Kepala Bagian) |
| 17. Kepala Seksi Commodities | : Wisman Achmad S.H. |
| 18. Kepala Seksi Arbitrasi | : E.F. Samola S.H. |
| 19. Kepala Bagian Tata Usaha | : A. Harahap |
| 20. Kepala Seksi Keuangan | : A. Karim |
| 21. Kepala Seksi Kepegawaian | : Horas Siregar |
| 22. Kepala Seksi Umum/R.T. | : Amansjah |
| 23. Kepala Seksi Agendaris/Arsip | : Rainan Natawiria. |

Masih tersedia dalam jumlah yang sangat terbatas Buku yang sangat diperlukan oleh business-man yakni : TRADE DIRECTORY of Indonesia 1964/1965.

Pesanan dapat segera diadjukan, kepada Tata Usaha Direkt. Marketing dan Research, Tanah Abang Timur 87.

Tebal buku 752 halaman, kertas kuntsdruk.

Harga per buku Rp. 15.000.—

C.V. 'NAROTAMA'

EXPORTERS, IMPORTERS & GENERAL AGENTS

DJALAN TOKO TIGA 55

TELEPON 21686

DJAKARTA KOTA

Cables : NAROTAMA DJAKARTA

EXPORT:

- * **COPRA**
- * **RUBBER**
- * **PEPPER**
- * **COFFEE**
- * **LUMBER**
- * **NUTMEGS**

IMPORT:

- * **ALL KINDS OF COMMODITIES**

PELANTIKAN DIREKSI B.P.U. -

UPATJARA PELANTIKAN.

Bertempat di Gedung Pantja Niaga Djakarta, pada tanggal 14 Mei 1965, Wakil Perdana Menteri I Dr. Subandrio selaku Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri, telah melantik anggota-anggota Direksi B.P.U.-Niaga dan anggota-anggota Direksi Perusahaan Niaga Negara, yang baru diangkat sesuai dengan keputusan J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Luar Negeri Brigdjen. A. Jusuf.

Dalam pertimbangan dari surat keputusannya, Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri Brigdjen. A. Jusuf mengatakan bahwa pengangkatan ini adalah "demi kelanjutan tugas-tugas pada Perusahaan-Perusahaan Niaga Negara satu dan lain untuk menyesuaikan tugas-tugas baru sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah".

Adapun susunan anggota Direksi B.P.U.-Niaga

yang baru adalah sebagai berikut :

1. Kolonel Usman Ismail — Pendjabat Presiden Direktur
 2. Sumardi Mangunkusumo SH — Pendjabat Direktur
 3. M.J. Prajogo — Pedjabat Direktur
- ditambah dengan seorang Pedjabat Direktur Drs. Soediarso yang berkedudukan di Amsterdam dengan tugas mengatur dan mengawasi Perwakilan-Perwakilan Perusahaan Niaga Negara di luar negeri.

(Nama-nama dari anggota Direksi dari 6 (enam) Perusahaan Niaga Negara yang dilantik dimuat dilain halaman dalam madjalah ini. — Red.).

Selain Dr. Subandrio, Dr. J. Leimena dan Dr. Chairul Saleh — Presidium Kabinet Dwikora lengkap — turut pula menghadiri upatjara pelantikan ini Menteri Urusan Bank Sentral Jusuf Muda Dalam, Menko Kompartimen Keuangan Soemarno S.H. dan Menteri Negara Oei Tjoe Tat S.H.

SAMBUTAN J.M. WAKIL PERDANA MENTERI I DR. SOEBANDRIO

Dr. Subandrio dalam kata sambutannya mengatakan bahwa sesuai dengan Revolusi yang sedang mengalami "upgrading", demikian pula para petugas baru dalam bidang perdagangan harus selalu mengadakan "upgrading" pada diri sendiri.

Revolusi Indonesia sekarang meningkat untuk melenjakkan "the era of imperialism" untuk membangun suatu dunia baru tanpa penghisapan manusia atas manusia.

Revolusi meningkat tidak sadja dalam tjorak, tetapi djuga dalam isi daripada perdjjuangan. Dr. Subandrio selandjutnja mengatakan bahwa dalam bidang ekonomi kita belum dapat dikatakan berdiri diatas kaki sendiri, lebih-lebih dalam bidang mental.

Bukanlah salah petugas-petugas kita dalam perdagangan, apabila mereka merasa belum mampu untuk menghadapi subversi, manipulasi dan dominasi kaum imperialis.

Mereka menghadapi tugas yang mahaberat, kata Dr. Subandrio, dimana revolusi "is in the upgrading" sehingga dalam melakukan tugas harus pula mengadakan "upgrading" diri sendiri, tidak boleh merasa puas dengan hasil-hasil yang telah ditjapai. Dr. Subandrio mengharapkan agar petugas-petugas yang baru sungguh-sungguh "in harmony" dengan "upgrading" daripada revolusi.

Dr. Subandrio mengatakan bahwa sesuai de-

(Bersambung ke hal. 26)



Wakil P.M. I Dr. Soebandrio

(foto Anta)

SIKAMBUTAN DIREKSI P.N. NIAGA

SAMBUTAN J.M. WAKIL PERDANA MENTERI II DR. J. LEIMENA

Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena dalam kata sambutannya mengatakan bahwa Perusahaan Niaga Negara mempunyai dua aspek, yakni: aspek sosial dan aspek ekonomis komersial. Aspek yang pertama adalah tugas memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah tugas untuk membawa keuntungan sebesar-besarnya bagi Negara demi pembangunan dan masyarakat.

Dr. Leimena selanjutnya mengatakan bahwa struktur dan organisasi yang lama dirubah untuk lebih disesuaikan dengan tuntutan djaman. Dalam hal merubah Perusahaan Dagang Negara menjadi Perusahaan Niaga Negara kita mendapati suatu prinsip, ialah bahwa pemerintah dan Negara akan berniaga dalam suatu arti yang seluas-luasnya.

Oleh karena beberapa hal dalam bulan-bulan yang lampau, dibawah Menteri Perdagangan yang lama, tidaklah terdjadi apa yang diharapkan dari reformasi itu. Dr. Leimena selanjutnya mengatakan bahwa Pemerintah mengharapkan bahwa Perusahaan-Perusahaan Niaga Negara ini akan berdjalan sebaik-baiknya. Hal ini akan ditjapai apabila "the lines" dari impor dan distribusi



Wakil P.M. II Dr. J. Leimena

(foto Antara)



Wakil P.M. III Dr. Chairul Saleh

(foto Antara)

keseluruh wilayah Indonesia berdjalan selantjar-lantjarnya.

Demikian djuga dalam hal ekspor, „bagaimana ekspor dapat berdjalan sebaik-baiknya kalau sistim pengumpulan daripada barang-barang dari daerah-daerah produksi tak baik!”

Dr. Leimena sekali lagi menekankan agar para Direksi BPU-Niaga dan Perusahaan Niaga Negara yang baru, memperhatikan apa yang telah dikatakan oleh WPM I Dr. Subandrio, dan agar mereka dalam menjalankan tugasnya selalu bersandar pada prinsip-prinsip niaga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, baik yang telah ada maupun yang akan dikeluarkan oleh M.P.R.S.

Achirnya Dr. Leimena menjatakan pengharapannya serta berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga kepada para petugas yang baru dilantik itu dapat diberikan taufik dan hidayah dalam melaksanakan tugas yang dipertjajakan kepada mereka.

• • •

SAMBUTAN J.M. WAKIL PERDANA MENTERI III DR. CHAIRUL SALEH

Wakil Perdana Menteri III Dr. Chairul Saleh dalam kata sambutannya mengatakan bahwa hendaknya bidang perdagangan didjadikan alat revolusi, alat konfrontasi bukan sadja terhadap

(Bersambung ke hal. 26)

ORGANISASI DAN SUSUNAN DIREKTORAT MARKETING DAN RESEARCH

(Surat Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri

No. : 016/4/MPLN/SK/65, tanggal 9-4-'65)

KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

MENIMBANG :

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri mengenai Susunan dan Organisasi Urusan Perdagangan Luar Negeri, dianggap perlu untuk segera menetapkan Susunan dan Organisasi Direktorat Marketing dan Research.

MENINGGAT :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 tahun 1965;
2. Surat Keputusan Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri No. 001/3/DPLN/SK/65 tanggal 15 Maret 1965.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

ORGANISASI DAN SUSUNAN DIREKTORAT MARKETING DAN RESEARCH sebagai berikut :

BAB I.

SUSUNAN

(lihat Bagan terlampir)

Pasal 1.

DIREKTORAT MARKETING DAN RESEARCH terdiri dari :

1. Kepala Direktorat Marketing dan Research;
2. Bagian Marketing Research and Planning/Programming;
3. Bagian International Trade Information Service;
4. Bagian International Trade Promotion;
5. Bagian Normalisasi dan Standardisasi;
6. Bagian Tata-Usaha.

BAB II.

FUNGSIONALISASI

Pasal 2.

Kepala Direktorat Marketing dan Research memimpin, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas² Direktorat Marketing dan Research seperti tertantum dalam pasal 9 Surat Keputusan Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri No. 001/3/DPLN/SK/65 tanggal 15 Maret 1965.

Pasal 3.

BAGIAN MARKETING RESEARCH AND PLANNING/PROGRAMMING bertugas antara lain :

1. mengadakan marketing survey dan marketing research baik didalam maupun diluar negeri berdasarkan adanya kesatuan koordinasi dan efisiensi pelaksanaan baik dari usaha² operasional yang dilaksanakan oleh perwakilan² Indonesia diluar negeri maupun oleh badan²/lembaga² research didalam dan diluar negeri;
2. mengumpulkan, mengolah, mengklasifikasi dan mengadakan dokumentasi mengenai angka/data statistik maupun perihal tiap² persoalan/problematik tertentu;
3. mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas Direktorat Marketing dan Research, yang dilaksanakan ditingkat Daerah Tingkat I maupun diluar negeri;
4. merumuskan suatu pola ekspor dan pola impor yang berupa baik penetapan target untuk jangka pendek maupun dalam bentuk planning/programming untuk jangka panjang dalam rangka kebidaksanaan pola pembangunan ekonomi Nasional.
5. merumuskan marketing policy c.q. pola perdagangan luar negeri yang setepat-tepatnya untuk tiap² commodity, antara lain yang mengenai :
 - a. sistim²/tjara² pemasaran barang² ekspor keluar negeri;
 - b. sistim²/tjara² pemasukan barang (impor) ke Indonesia.

Pasal 4.

BAGIAN INTERNATIONAL TRADE INFORMATION SERVICE bertugas antara lain :

1. melajani dan mempertemukan badan² usaha dari Indonesia dan trade partnernja dari luar negeri yang bergerak dibidang perdagangan luar negeri dengan antara lain djuga mempergunakan saluran perwakilan² Indonesia di luar negeri;
2. menerbitkan publikasi berkala baik untuk keperluan intern Urusan Perdagangan Luar Negeri Kompartimen, maupun yang ditujukan kepada dunia perdagangan internasional dan bersifat „trade information pada khususnya dan „issue on economic development” pada umumnya;
3. menjelenggarakan usaha perpustakaan dalam bidang perdagangan internasional;
4. memberikan penerangan² yang bersifat informatoris maupun psychologis dan opvoedkundig kepada masyarakat Indonesia pada khususnya dan dunia perdagangan internasional pada umumnya yang bertudjuan untuk menanam dan memupuk pengertian tentang usaha² Kompartimen dalam bidang Urusan Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 5.
BAGIAN INTERNATIONAL TRADE PROMOTION

Bertugas antara lain :

1. merumuskan trade trend dalam dunia perdagangan internasional dengan mengikuti perkembangan hubungan perdagangan antar negara dan bentuk² dan tjara² kerdja-sama internasional berdasarkan antara lain :
 - a. adanja trade barriers/tariff wall versus pre-freatial treatment/common market dari suatu negara/beberapa negara terhadap suatu negara/beberapa negara jang lain;
 - b. adanja international commodity-agreements/study-groups;
 - c. mengadakan analisa tentang production-projections, domestic consumption-projection dan world demand-projection dari tiap² commodity jang dihasilkan atau dapat dihasilkan oleh Indonesia;
2. menerbitkan brosur², trade directory dan lain²;
3. mengadakan show-room dari barang² ekspor Indonesia dipusat² perdagangan luar negeri;
4. turut aktif dalam pameran² dan pekan² dagang internasional.

Pasal 6.
BAGIAN NORMALISASI DAN STANDARDISASI

Bertugas antara lain :

mempelajari trading rules/standard-contracts serta ketentuan-ketentuan umum lainnja jang berlaku dalam dunia perdagangan internasional; turut berusaha menetapkan pola kanalisasi barang-barang ekspor dan pola distribusi serta peredaran dan penjalurannya kepada konsumen didalam negeri, c.q. „herordering” marketing didalam negeri dalam rangka ekonomi terpimpin; turut berusaha merumuskan norma-norma dan standard-standard dalam bidang perdagangan/tata-niaga didalam negeri, c.q. adanja „trading rules” dalam rangka ekonomi terpimpin; merumuskan standard-standard mutu specification (physical & chemical characteristic) dari barang-barang asal Indonesia jang akan diekspor.

Pasal 7.
BAGIAN TATA-USAHA

Bertugas melaksanakan segala pekerdjaan dan menjelesaikan segala persoalan jang terletak dalam bidang administrasi dari Direktorat Marketing dan Research, antara lain :
mengurus hal-hal kepegawaijan, anggaran belanja dan keuangan;
mengurus hal-hal jang bertalian dengan gedung-gedung, rumah-tangga dan peralatan;
melaksanakan pekerdjaan arsip, tik dan ekspedisi;
mengurus kesedjahteraan para pegawai dalam arti kata seluas-luasnja;

5. tugas-tugas lainnja dalam bidang administrasi jang ditetapkan oleh Kepala Direktorat Marketing dan Research

BAB III.
PERWAKILAN/UNSUR² DIREKTORAT MARKETING DAN RESEARCH.

Pasal 8.

1. Dengan persetujuan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri, Kepala Direktorat Marketing dan Research mengadakan/mendirikan Perwakilan-Perwakilan ditiap-tiap Daerah Tingkat I.
2. Perwakilan tersebut dalam ajat (1), bertugas untuk membantu Kepala Direktorat Marketing dan Research untuk antara lain :
 - a. merumuskan pola impor dan pola ekspor untuk Daerah Tingkat I jang bersangkutan;
 - b. merumuskan kanalisasi barang-barang ekspor keaparap-aparap ekspor dan menggariskan suatu pola distribusi/penjaluran kekonsumen di Daerah Tingkat I jang bersangkutan.

Pasal 9.

Dalam melaksanakan tugasnja jang terletak dibidang luar negeri, Direktorat Marketing dan Research mempergunakan dan bekerdja-sama jang erat dengan aparat-aparat Pemerintah dan badan-badan usaha negara jang berkedudukan diluar negeri dan bergerak dibidang perdagangan luar negeri antara lain : Economic Counsellor/Attache, Commercial Attache, Trade Commissioner/Representative, Perwakilan/Tjabang Perusahaan Niaga Negara, Perwakilan/Tjabang Perusahaan Negara lainnja, Joint-ventures, „Commercial Intelligence”.

BAB IV.

KETENTUAN² PERALIHAN/PENUTUP.

Pasal 10.

Tatakerdja dari Direktorat Marketing dan Research akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Direktorat Marketing dan Research.

Pasal 11.

Hal-hal jang belum atau belum tjukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri/Kepala Direktorat Marketing dan Research

Pasal 12.

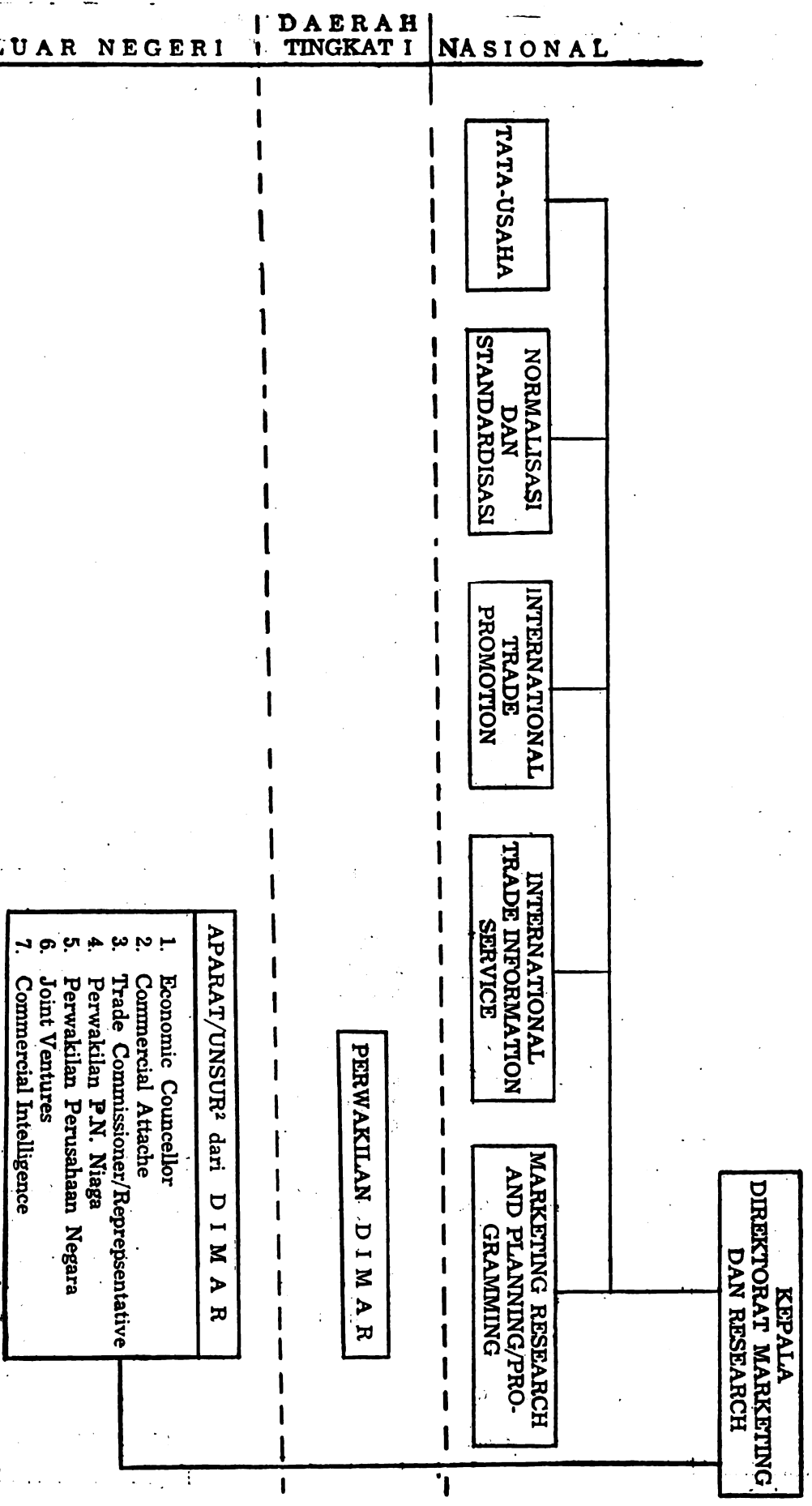
1. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 15 Maret 1965.
2. Agar semua orang mengetahuinja, mengundang Surat Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

(A. J U S U F)

Brig. Djendral T.N.I

**BAGAN SUSUNAN DAN ORGANISASI DIREKTORAT
MARKETING DAN RESEARCH**



LUAR NEGERI | DAERAH TINGKAT I | NASIONAL

ORGANISASI DAN SUSUNAN DIREKTORAT EKSPOR

KEPUTUSAN

KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

No. 019/4/MPLN/SK/65 TANGGAL 9 APRIL 1965.

KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

MENIMBANG :

bahwa, dengan dikeluarkannya Keputusan Menko Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri mengenai Susunan dan Organisasi Urusan Perdagangan Luar Negeri, dianggap perlu untuk segera menetapkan susunan dan organisasi Direktorat Ekspor;

MENINGGAT :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 tahun 1965;
2. Surat Keputusan Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri No. 001/3/MPLN/SK/65 tanggal 15 Maret 1965.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

ORGANISASI DAN SUSUNAN DIREKTORAT EKSPOR sebagai berikut :

BAB I

Kedudukan dan tugas pokok

Pasal 1

KEDUDUKAN

Direktorat Ekspor merupakan bagian dari Urusan Perdagangan Luar Negeri,

Pasal 2

TUGAS POKOK

Direktorat Ekspor mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dibidang Ekspor, sebagaimana tersebut dalam pasal 6 Surat Keputusan Menko Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri No. 001/3/MPLN/SK/65 tanggal 15 Maret 1965.

BAB II

Organisasi dan susunan (lihat Bagan terlampir)

Pasal 3

DIREKTORAT EKSPOR terdiri dari :

1. Kepala Direktorat Ekspor ;
2. Bagian Perentjanaan Programming dan Pengawasan Harga ;
3. Bagian Inspeksi Daerah-Daerah ;
4. Bagian Tata Usaha.

BAB III

Fungsi dan kegiatan

Pasal 4

1. Kepala Direktorat Ekspor bertugas : memimpin, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas Direktorat Ekspor.
2. Dalam hal Kepala Direktorat Ekspor berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, maka pimpinan diwakilkan kepada Kepala Bagian Perentjanaan, Programming dan Pengawasan Harga, yang selanjutnya dinamakan Wakil Kepala Direktorat Ekspor.

Pasal 5

PERENTJANAAN, PROGRAMMING DAN PENGAWASAN HARGA

bertugas antara lain :

1. Mempeladjadi, memikirkan, menjusun dan mengusulkan target ekspor pada umumnya, program² kerja pada khususnya ;
2. Mengikuti pelaksanaan target dan perkembangan ekspor dari tiap² Daswati I pada khususnya, dari seluruh Indonesia pada umumnya, serta mempeladjadi berita² harian, lain² laporan, dan mengusulkan tindakan² yang perlu diambil dengan segera ;
3. Aktip mengerahkan pikiran dan usaha penggalan barang² dan hasil² bumi baru, istimewa dalam sektor perindustrian dan memperkembangkan ekspor pada umumnya ;
4. Menjiapkan laporan² perkembangan ekspor, yaitu : Sepuluh harian, Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan ;
5. Mengikuti, melaksanakan pengawasan dan melakukan dokumentasi terhadap usaha² operasional yang dilaksanakan oleh Tjadek², terutama dalam bidang penetapan harga² dan pemberian izin² barang² dan/atau hasil² bumi ekspor ;
6. Mengikuti setjara aktip, menganalisa dan mengusulkan perbaikan² mengenai harga barang² dan/atau hasil² bumi ekspor yang disiarkan oleh B.L.L.D. ;
7. Memikirkan, mempersiapkan dan meneruskan kepada Tjadek² harga barang² dan/atau hasil² bumi ekspor, yang tidak disiarkan oleh B.L.L.D.

Pasal 6.

BAGIAN INSPEKSI DAERAH, bertugas antara lain :

1. Setjara aktip melakukan inspeksi ke-daerah² terhadap kegiatan² Tjadek² pada khususnya, kegiatan ekspor pada umumnya ;

2. Mempeladajari kesulitan² jang dialami daerah dalam bidang pelaksanaan ekspor dan memikirkan serta mengusulkan perbaikan atau tjara² jang tepat ;
3. Memberikan penerangan-penerangan dibidang technis ekspor kepada aparat² ekspor didaerah.

Pasal 7.

BAGIAN TATA USAHA, bertugas antara lain :

Membantu Direktorat Ekspor dalam melakukan tugasnja sehari-hari dibidang administrasi, personalia, anggaran belandja, perlengkapan, rumah tangga dan peralatannja, kesedjahteraan pegawai, arsip, tik ekspedisi dan tugas² lain jang ditetapkan oleh Kepala Direktorat Ekspor.

B A B IV.

Tjabang-tjabang direktorat ekspor.

Pasal 8.

1. Dengan persetujuan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri Direktorat Ekspor mengadakan/mendirikan Seksi Ekspor pada perwakilan Departemen Perdagangan ditiap-tiap Ibukota Daerah² Tingkat I dan Tjabang² DEK dipelabuhan lainnja ;
2. Tjabang Direktorat Ekspor dimaksud dalam ayat 1 bertugas antara lain :
 - a. melaksanakan tugas pengendalian ekspor administratif jang diwenangkan kepadanja dibidang penetapan harga dan pemberian

izin² ekspor barang² dan atau hasil² bumi ekspor ;

- b. melaksanakan tugas² lainnja jang ditetapkan oleh Kepala Direktorat Ekspor.

Pasal 9.

Bilamana dianggap perlu, Kepala Direktorat Ekspor dapat mendirikan Tjabang² Direktorat Ekspor di-pelabuhan² tertentu.

B A B V.

Ketentuan-ketentuan peralihan/penutup

Pasal 10.

Tata-kerdja dari Direktorat Ekspor akan ditetapkan lebih landjut oleh Kepala Direktorat Ekspor.

Pasal 11.

Hal-hal jang belum tjukup atau belum diatur dalam Surat Keputusan ini, akan ditetapkan lebih landjut oleh Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri/Kepala Direktorat Ekspor.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : D j a k a r t a .

Pada tanggal : 9 April 1965.

**KUASA MENTERI PERDAGANGAN
LUAR NEGERI,**

ttd.

(A. JUSUF)

Brig. Djendral T.N.I.

(Sambungan dari hal. 21)

Sambutan Dr. Chairul Saleh

Malaysia, tetapi sesuai dengan sifat daripada tahun 1965 ini dengan meningkatnja revolusi, djuga sebagai alat konfrontasi terhadap seluruh nekolim.

Dr. Chairul Saleh selandjutnja mengatakan bahwa hendaknja kita meninggalkan tjara berpikir jang lama, tjara berpikir dalam "kotak-kotak" dimana segala sesuatu ditentukan oleh kotak masing-masing.

Hal ini adalah berpikir jang statis, kita seharusnya berpikir setjara dialektis. Para petugas baru seharusnya mengabdikan dalam akumulasi modal untuk kas negara dengan tetap memelihara kestabilan harga.

Ini berarti harus adanya kerdjasama dengan bidang produksi, para petugas baru dari Perusahaan Niaga Negara hendaknja langsung ikut dalam menstimulir produksi, tidak menanti-nanti setjara kotak-kotak apa jang dapat dihasilkan oleh bidang produksi.

Dalam mengusahakan berdiri diatas kaki sendiri, volume produksi sangat penting, tetapi djuga membangun dan menstimulir produksi adalah penting.

Selandjutnja Dr. Chairul Saleh mengingatkan para petugas baru bahwa mereka mempunyai tu-

gas jang sangat penting dan menduduki tempat jang sangat terhormat, jang seharusnya di "envy" oleh tiap patriot Indonesia jang sedjati.

Achirnja Dr. Chairul Saleh menjatakan harappnja agar tugas selalu dilaksanakan dengan spirit jang amat tinggi supaya dapat menghasilkan bukti-bukti jang njata dan hendaknja adjaran-adjaran dari Pemimpin Besar Revolusi kita didjadikan sendjata mental dalam menentukan arah dan tudjuan dan pembinaan bidang.

(Sambungan dari hal. 20)

Sambutan Dr Subandrio

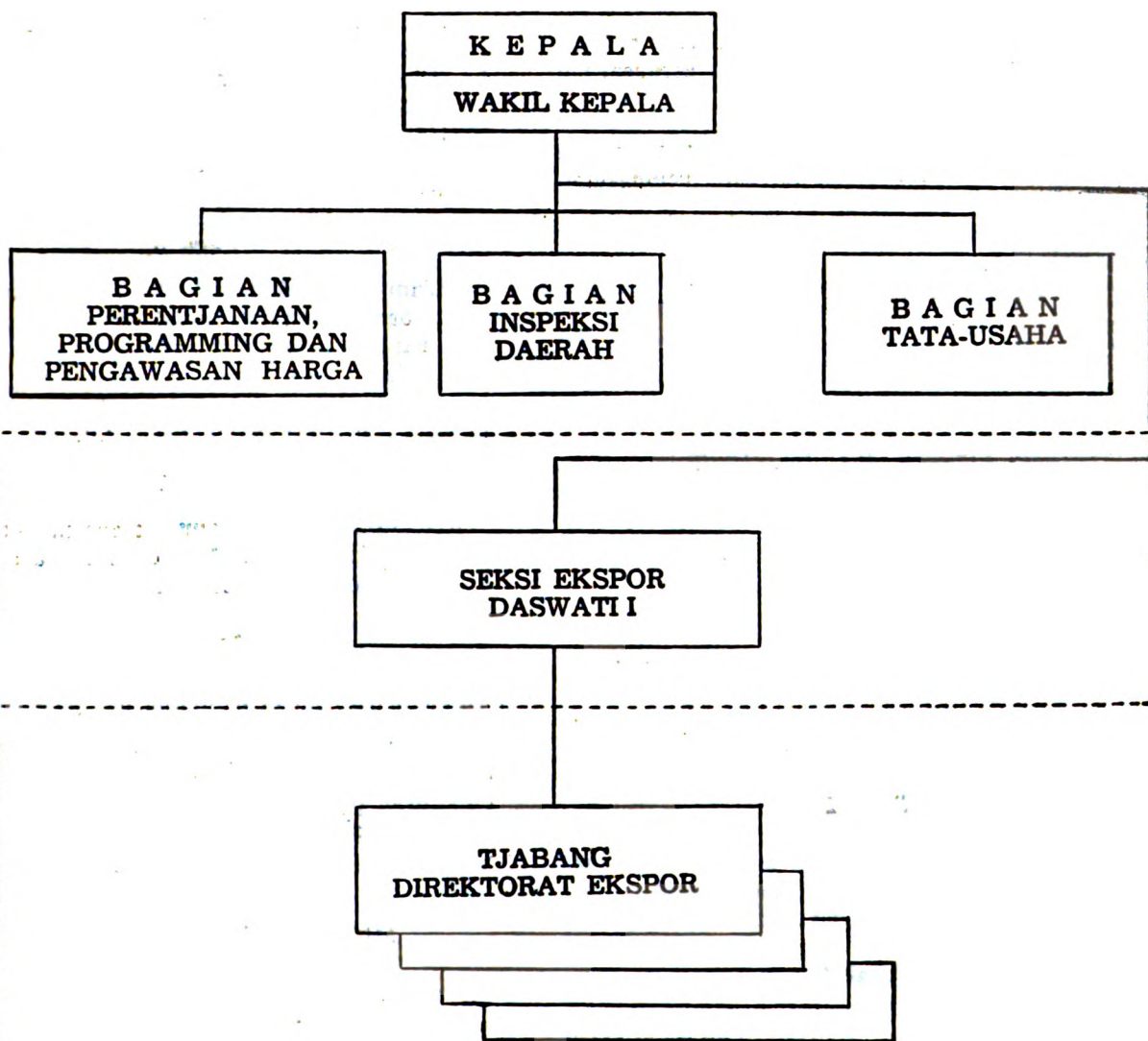
ngan apa jang ditjantumkan dalam surat keputusan, "bila dikemudian hari ternjata terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan perobahan seperlunja", kesalahan dalam hal ini djangan diartikan setjara administratif sadja tetapi dapat djuga berarti orangnja.

"Saudara-saudaralah jang akan meritul dir saudara sendiri", demikian Dr. Subandrio katakan. Jang dibutuhkan adalah hasil² jang konkrit tak perlu memberikan alasan-alasan mengapagal.

Achirnja Dr. Hadji Subandrio menjatakan ke pertjajaannja bahwa para petugas-petugas baru akan sanggup melaksanakan target jang ditetapkan Pemerintah dan melantik mereka sambi mengutjapkan : "BISMILLAH".

LAMPIRAN: Surat Keputusan Kuasa Menteri
Perdagangan Luar Negeri
No. 019/4/MPLN/SK/65 Tanggal 9 April
1965 Tentang Organisasi dan
Susunan Direktorat Ekspor.

BAGAN SUSUNAN DAN ORGANISASI DIREKTORAT EKSPOR



KETENTUAN-KETENTUAN BARU MENGENAI S.P.P.

Surat Keputusan Bersama Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Perdagangan/Kuasa Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri No. Kep. 35/UBS/65 tertanggal 10 Mei 1965.

MENTERI URUSAN BANK SENTRAL DAN
MENTERI PERDAGANGAN/KUASA MENTERI
URUSAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI;

Menimbang :

- a) bahwa dianggap perlu untuk mentiadakan unsur² spekulatif dalam perdagangan S.P.P.
- b) bahwa selama S.P.P. diperdagangkan dibawah tangan sukar untuk mengadakan penertiban yang diperlukan;
- c) bahwa dianggap perlu untuk diusahakan sedjauh mungkin kemantapan harga dalam perdagangan S.P.P.;
- d) bahwa dianggap perlu untuk lebih mengerahkan penggunaan S.P.P. untuk tudjuan² peningkatan produksi.

Memperhatikan :

Surat Keputusan Bersama Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Perdagangan No. Kep. 23 dan 24/UBS/64 tanggal 22 April 1964.

Mengingat :

Peraturan Presiden R.I. No. 13 Tahun 1964 pasal 4.

MEMUTUSKAN :

Pasal 1.

Mulai dari tanggal penetapan Surat Keputusan Bersama ini tiap² S.P.P. berlaku selama satu bulan takwim terhitung dari tanggal Schedule of Remittance yang bersangkutan.

Pasal 2.

S.P.P. tidak diperkenankan lagi untuk didjual belikan dibawah tangan dan hanja dapat didjual belikan melalui Bursa di Djakarta.

Pasal 3.

Jang diperkenankan untuk membeli S.P.P. di bursa adalah importir jang telah mempunjai angka pengenal sebagai importir, eksportir jang telah mempunjai angka pengenal sebagai eksportir, eksportir produsen jang telah mempunjai angka pengenal sebagai eksportir dan perusahaan² jang boleh mengimpor sendiri jang telah mempunjai angka pengenal bersangkutan.

Pasal 4.

Pengimporan barang² atas dasar S.P.P. hanja dapat dilakukan oleh pihak jang namanja tertjantung pada S.P.P. jang bersangkutan.

Pasal 5.

- a. Mulai tanggal ketentuan S.K.B. ini L/C² (Letter of Credits) mengenai impor berdasarkan S.P.P. hanja dapat dibuka untuk impor barang² golongan I, II dan III, dengan ketentuan barang golongan III dibatasi djenis² barangnja sebagai mana akan diperintji lagi oleh Departemen Perdagangan.
- b. Sehubungan dengan sub a diatas maka P.I. berdasarkan S.P.P. memerlukan pengesahan terentang djenis² barangnja dari B.L.L.D. - Tjabang² B.L.L.D. sebelum L-C dapat dibuka oleh Bank-Bank.

Pasal 6.

Dalam hal P.I. 2 ditolak oleh B.L.L.D. berhubung djenis barangnja tidak sesuai dengan djenis barang jang telah ditentukan dalam pasal 5a diatas, maka dapat diajukan P.I. baru untuk satu kali sadja dalam waktu 7 hari setelah tanggal penolakan tanjmelihat lagi masa berlakunja S.P.P. jbs.

Pasal 7.

Ketentuan² lebih landjut mengenai sjarat² dan tjara² perdagangan S.P.P. di Bursa akan diatur ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 8.

Peraturan² lain mengenai S.P.P. sekedar tidak bertentangan dengan peraturan ini, tetap berlaku.

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, maka rintahkan pengundangan Surat Keputusan Bersama ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 10 Mei 1965.

MENTERI URUSAN BANK SENTRAL

t.t.d.

JUSUF MUDA DALAM.

MENTERI PERDAGANGAN/KUASA MENTERI
URUSAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

t.t.d.

ACHMAD JUSUF

Brig. Djen. T.N.I.

KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI URUSAN BANK SENTRAL DAN MENTERI PERDAGANGAN/KUASA MENTERI URUSAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI NO. KEP. 35/UBS/65 TANGGAL 10 MEI 1965 MENGENAI SURAT PENDORONG PRODUKSI (S.P.P.).

(Pengumuman Biro Lalu Lintas Devisa No. 2/Eks/Blld/65 - tgl. 10-5-1965)

Berhubung dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama tersebut diatas dan menunduk pada Pengumuman Pimpinan L.A.A.P.L.N. No. 38 tanggal 30 April 1964 dan No. 63 tanggal 18 Agustus 1964, maka bersama ini ditetapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya sebagai berikut :

- Pasal 1 dari Surat Keputusan Bersama tersebut diatas harus diartikan bahwa :
- Ekspor yang Schedule of Remittancenja bertanggal 10 Mei 1965 dan berikutnya memperoleh SPP yang berlaku selama satu bulan takwin terhitung dari tanggal Schedule of Remittance tersebut.
 - Ekspor yang Schedule of Remittancenja bertanggal sebelum tanggal 10 Mei 1965 tetap memperoleh SPP yang berlaku selama dua bulan takwin terhitung dari tanggal Schedule of Remittance yang bersangkutan.

Tjataan : Dengan satu bulan takwin dimaksud suatu masa terhitung dari suatu tanggal sampai tanggal yang sama bulan berikutnya (misalnya untuk 10 Mei 1965 satu bulan takwin adalah 10/5/65 sampai 10/6/65).

- Pasal 5 dari Surat Keputusan Bersama tersebut diatas mengenai barang yang boleh diimpor dengan S.P.P. tidak saja berlaku terhadap S.P.P. termaksud pada sub 1 a diatas, akan tetapi juga terhadap S.P.P. termaksud pada sub 1 b diatas.

Apabila eksportir/producen-eksportir tidak menggunakan sendiri Surat Pendorong Produksi (SPP)-nja untuk impor (seluruhnja atau sebagian yang belum dipergunakan), maka dalam batas waktu berlakunja, dapat ia menawarkan SPP-nja kepada Bursa di Djakarta menurut prosedur yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Untuk memenuhi ketentuan pasal 4 dari Surat Keputusan Bersama tersebut diatas, maka dengan ini Bank Indonesia dikuasakan untuk mengeluarkan S.P.P. "Bursa" atas nama sipembeli hingga djumlah Rupiah-Devisa dari S.P.P.² yang terdjual pada Bursa, dengan masa-laku satu bulan takwin terhitung dari tanggal pengeluaran SPP-Bursa tersebut.

S.P.P. "Bursa" tidak dapat didjual/dipindah-tangankan lagi.

Ketentuan-ketentuan termaksud pada sub 1 dan 2 diatas berlaku juga terhadap S.P.P. — Tambahan tanpa mengurangi keharusan memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan mengenai barangnja dan dengan tjataan bahwa S.P.P. — Tambahan tidak boleh didjual-belikan/ditawarkan kepada Bursa.

S.P.P. dan S.P.P. — Tambahan, yang Schedule of Remittancenja bertanggal sebelum 10 Mei 1965, dan sementara itu telah dipindah-tangankan masih dapat diadjudkan oleh pemegangnja selambat-lambatnja tanggal 31 Mei 1965, sekedar S.P.P. (Tambahan)-nja masih berlaku.

Ketentuan-ketentuan diatas mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 1965.

**PIMPINAN
BIRO LALU LINTAS DEvisa
DIREKTORIUM,**

R.A. Kartadjoemena

A.A. Harahap.

IMPOR DENGAN SURAT PENDORONG PRODUKSI (S.P.P.).

(Pengumuman Biro Lalu Lintas Devisa No. 9/Imp/BllD/65 tgl. 13-5-1965)

Berhubung dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Perdagangan/Kuasa Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri No. Kep. 35/UBS/65 tanggal 10 Mei 1965 serta menundjuk pada :

a. Pengumuman Pimpinan LAAPLN No. 41 tanggal 30 April 1964

b. Pengumuman BLLD No. 2/Eks/BLLD/65 tanggal 13 Mei 1965

maka bersama ini ditetapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pada set Pernyataan Impor (P.I.), yang oleh yang berkepentingan setelah diisi lengkap, diajukan kepada Bank, harus ditambahkan 2 (dua) lembar ekstra untuk Biro Lalu Lintas Devisa.

2. Sesuai dengan pasal 4 dari Surat Keputusan Bersama tersebut diatas maka P.I. hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tertantum pada S.P.P., baik S.P.P. asli (eksportir) maupun S.P.P.-Bursa, sebagaimana dimaksud pada Pengumuman BLLD tersebut diatas sub 4 dan sub 7.

3. Setelah Bank membubuhi Nomor Registrasi, tanggal, tandatangan dan tjap Bank pada P.I. tersebut, maka Bank mengirimkan lembar ke-1, ke-2, ke-7 dan ke-8 kepada BLLD (Impor) setempat dengan Surat Pengantar rangkap 5 (lima) menurut tjontoh terlampir guna memperoleh pengesahan tentang jenis dan golongan barang yang tertantum pada R.I. tersebut seraja menahan S.P.P. (-S.P.P.) yang bersangkutan.

4. Pengesahan P.I.-P.I. tersebut oleh B.L.L.D. akan ditjantumkan kepada lembar ke-1 dan ke-2, yang oleh B.L.L.D. akan dikirimkan kepada Bank dengan Surat Pengantar „P.I. yang disahkan”.

5. Baru setelah Bank menerima kembali P.I. lembar ke-1 dan ke-2 itu impornja dapat direalisasikan.

6. Apabila B.L.L.D. tidak dapat mengesahkan suatu P.I. karena barang yang tertantum didalamnya jenis/golongannya tidak sesuai dengan ketentuan pasal 5 dari Surat Keputusan Bersama tersebut diatas, maka P.I. tersebut ditolak

dan dikembalikan kepada Bank dengan Surat Pengantar „P.I. yang Ditolak”.

7. Sesuai dengan pasal 6 dari Surat Keputusan Bersama tersebut diatas maka yang berkepentingan dapat mengajukan P.I. „Pembaharuan” dalam waktu 7 (tudjuh) hari kerdja, terhitung dari tanggal penerimaan P.I. „Ditolak” oleh Bank, kepada Bank, dengan melampirkan P.I. — „Ditolak” yang bersangkutan.

8. Bank meneruskan P.I. „Pembaharuan” ini menurut prosedur termaksud pada sub 3 diatas. Perlu dalam hal ini diperhatikan bahwa keputusan B.L.L.D. terhadap P.I. „Pembaharuan” adalah keputusan mutakhir (final) yang berarti bahwa apabila barang yang tertantum pada P.I. tersebut tidak sesuai lagi dengan barang termaksud pada pasal Surat Keputusan Bersama tersebut diatas, S.P.P. yang bersangkutan dengan sendirinja mendjadi batal untuk sedjumlahnya NTR dari barang yang ditolak dimaksud.

9. Maka dari itu diandjurkan kepada yang berkepentingan agar :

a. dalam menentukan barang yang hendak di impor benar² memilih barang² sebagaimana termaksud pada pasal 5 dari Surat Keputusan Bersama tersebut diatas.

b. Uraian barang pada baris 8 dari P.I. demikian rupa djelas dan lengkapnja, sehingga mudah ditentukan ketetapan pengisian baris 9 (jenis barang) dan baris 10 (golongan dan tarip pos) dari P.I. tersebut.

c. bilamana perlu melampirkan brochur tjontoh barang yang bersangkutan.

10. Ketentuan-ketentuan diatas mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 1965.

PIMPINAN

BIRO LALU LINTAS DEvisa

DIREKTORIUM,

ttd.

R.A. Kartadjoemena.

Martojo Koen

DJENIS BARANG-BARANG JANG DAPAT DIIMPOR DENGAN S.P.P:

Sebagai follow-up Keputusan Bersama Menteri Bank Sentral dan Menteri Perdagangan/Kuasa Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri No. Kep. 35/UBS/65 tanggal 10 Mei 1965, Kepala Direktorat Impor Urusan Perdagangan Luar Negeri telah mengeluarkan Peraturan Pelaksanaan No. 246/Kep. Dim/65, tgl. 17-5-1965 dan no. 252/Kep. Dim/65 tgl. 18 Mei 1965 tentang "Djenis Barang-barang jang dapat diimpor dengan menggunakan Surat Pendorong Produksi (S.P.P.)", sebagai berikut :

Pertama :
Djenis barang² jang dapat diimpor dengan menggunakan Surat Pendorong Produksi (S.P.P.) adalah djenis barang² jang tersebut dalam daftar lampiran Peraturan Pelaksanaan ini;

Kedua :

Peraturan Pelaksanaan ini berlaku surut tanggal 10 Mei 1965, dengan ketentuan² bahwa bagi L/C-L/C jang sudah dibuka sebelum tanggal 10 Mei 1965 masih berlaku ketentuan² pengimporan djenis barang² jang termasuk dalam golongan ekonomi I, II dan III seperti tersebut dalam lampiran I, II dan III Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 105/M/SK/64 tanggal 22 April 1964 jang telah diubah dan ditambah;

Ketiga :

Segala sesuatu akan ditinjau lagi djika kemudian terdapat kekeliruan.

Lampiran Peraturan Pelaksanaan No. 246/KEP. DIM/65 Tgl. 17 Mei 1965.

Urut pos nomor.	Tarif pos nomor.	Tarif pos nomor.	Tarif pos nomor.
24	153 - I , b - II a, b, c.	199	346 - I a,b (hanja kle- dingsstoffen van (kunstzijde)
32	154 (hanja mirbaan- olie)	200	347
36 - I	156	201 - II.	349
40	157	209 - I-II.	351 - I-II.
43 - I.	158	220	353 - I-II.
50 - II-III.	159 - I (hanja dengan Izin Dep. Perdag.	230	355 - I-II a, b
58	159 - III. a (hanja dgn. izin Dep. Kes)	231	356 - I b I - II a,b, 1 dan 2.
59 - I-III.	160	234 - I-II.	357 - I.
61 - I-III (hanja de- ngan izin Dep. Kes.)	161 - I-II.	235 - II-IV (hanja sub III a limitatief, sesuai dengan ke- kurangan kebutu- han dalam ne- geri).	359 - I.
70	163	235 - III. b	362 - I.
72 - I-II.	164	237 - I.	363 - I.
75	165	244 - I.	364
80 - I.	166 - I-II (hanja de- ngan izin Dep. Kes.)	258 - I.	366 (dengan izin Komp. Pertanian dan Agraria).
126 - I.	167 - I-II b.	262	367 - I.
127 (hanja jang ter- masuk dalam gol. II).	168 - I-II a, dan b.	281	368
128	169 - I a,b - II a,b.	284	369
131	170 - I-II a,b.	300	374 - I.
132	171	305	377
133 - I-II.	172	307 - I-II-III.	378
135 - I-II.	173 - I a, b - II a	308 - I-II.	379 - I-II.
137	174	309 - II.	380
140	175	315 - I-II.	381
141	176	331 - I-II.	382
142 - II.	177 - II a.	334 - I-IIb (hanja de- ngan izin P.D.K. P.T.I.P.)	383
144	179	341 - I	384
145	181 - I-II a,b,l.	343	385 - I a - II.
146 - II.	190 (hanja Turkse Roodolie).	344 - I-II.	386
148 - I-II.	196 - II.		387
149 - II.	198 (hanja untuk o- bat ² -an jang ter- masuk dlm. gol. I		388
150			391 - I - II.
151			

Djenis Barang' jang dapat diimpor dengan S.P.P.

Tarif pos nomor.	Tarif pos nomor.	Tarif pos nomor.	Tarif pos nomor.
408	569	690	* 760
422	570 - II.	691	* 761 - I-II.
443 - II.	571	692	* 762
444	575	694	764
447	577	695 - II.	765 - I-II.
449 - I-II.	578 - I-II.	700	* 766 - I a - II.
451	579	706	* 768
455 - I a,b - II.	580 - I-II.	707	* 769
457	581	* 711	* 776 - I.
464	583 (hanja ijzerzand)	* 712	* 777
465	597	* 713	* 778 - I.
466	598 - I.	**714 - II cl.	* 779 - I-II.
479	600	* 714 - III. a, b (untuk b	* 780
480 - I.	601	jang tidak terma-	* 781 - I-II.
481 - I.	602	suk gol. IV) dan c.	782
489	604	* 715	783
491 - III.	605 - I.	* 716 - I-II.	784
494	607 - I.	* 717 - I.-II.	785
495	609	* 718 - I-II.	* 786 - I-II.
497 - II.	610 - I-II.	* 719 - I-II.	787 - I b 1
504	611	* 720	789 - I a - II.
509	618 - I.	* 721	790 - I - II b.
512	619	* 722	* 791
513	620	* 723 - I-II.	* 792 - I.
515 - I.	621 - I.	* 724 - I.	* 792 - IV
516 - I (hanja dengan	624	* 725	* 796
izin Deperindra).	627	* 726	* 797
519 - II.	628	* 727	798
525 - I-II a,b.	629	* 728 - I-II.	* 799 - I-II.
526 - I-II.	630 - I a,b.	* 729	* 800
527	631	* 730	* 801 - II.
528	632 - I.	* 731 - II.	* 802
529	633	* 732 - I-II.	**803 - II.
530	634	* 733	* 805
531	636 - I.	* 734	* 806
532	640 - I a,b.	* 735	* 807
533 - I-II.	641 - I-III.	* 736 - I-II.	* 812 - I.
534 - I (hanja dakij-	642 - I a,b.	* 737	* 813 - II b.
zer).	643	* 738 - II.	814
536	644	* 739 - I-II.	815
538	645	* 740	816 - II. a, b.
539 - I-II.	647	* 741	817
540	648 - I-II.	* 742 - II.	818
541	652 - I-II.	* 743	819 - II.
542	653 - I.	* 744	820
543 - I-II.	654	* 746 - I-II.	821
548	655	* 747	824
550	656	* 748	825
552 - I a-II a.	657	* 749	826
554 - I	658	* 750	828
555	663	* 751	829 - II.
558	664	* 752	830 - II.
562	667	* 755 - I b - II b	* 831
564	668	* 756	* 832
565 - I a 2, b,c,d,e,f-II.	669	* 757	* 833
566	670	* 758	836 - I (hanja
567 - I-II.	671	* 759	radiatoren dan ve
	672 - Ia,		(Bersambung ke hal.

KETENTUAN-KETENTUAN DJUAL BELI SPP DI BURSA.

Dengan menundjuk kepada Surat Keputusan bersama Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Perdagangan/Kuasa Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri No. Kep. 35/UBS/65 tanggal 10 Mei 1965, maka dengan ini dipermaclumkan bahwa semua Pengumuman-pengumuman Bank Indonesia tentang djual beli S.P.P. jang telah dikeluarkan sebelumnya ini ditjabut.

Untuk selandjutnja djual beli S.P.P. di Bursa, bersarkan pasal 3 dari S.K.B. Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Perdagangan/Kuasa Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri tersebut diatas tetapkan sebagai berikut.

MUM :

Bursa diadakan pada tiap hari Selasa dan dimulai pada tanggal 25 Mei 1965.

Fraksi Kurs se-ketjil²nja adalah 1/10 point. Jang dapat diperdagangkan dalam Bursa hanya S.P.P.2 jang masih berlaku.

Surat Pendaftaran untuk pendjualan atau pembelian, jang dapat diminta dengan tjuma² pada Seksi S.P.P. di Bank Indonesia Djakarta Kota atau Tjabang² Bank Indonesia, harus dimasukkan dalam sampul tertutup dan kemudian dimasukkan kedalam dua buah teromol-masing² terpisah khusus untuk pendjualan dan untuk pembelian jang akan disediakan diruangan Bursa Effek² s/d hari Sabtu dari djam 08.00 — 10.00 pagi, selewatnja tidak akan diterima lagi Surat² Pendaftaran.

S.P.P. jang diperoleh berdasarkan transaksi Bursa mempunyai masa berlaku 1 bulan (30 hari) mulai tanggal transaksi.

Di Bursa jang menentukan transaksi bukannya kurs jang tertinggi, melainkan kurs jang menetapkan djumlah transaksi (omzet) jang terbesar.

PENDJUALAN :

a) S.P.P. harus se-kurang²nja masih berlaku untuk 3 (tiga) hari terhitung dari hari penawaran kepada Bank Indonesia Djakarta-Kota.

b) Agar supaja pemilik² S.P.P. di-daerah² dapat mendjual S.P.P.-nja tepat pada waktunya, maka bagi mereka ketetapan „masih berlaku 3 hari” terhitung dari hari penawaran kepada Tjabang Bank Indonesia jang terdekat.

a) S.P.P. jang bersangkutan se-lambat²nja harus disampaikan kepada Bank Indonesia Djakarta-Kota pada hari² Sabtu jang mendahului hari Bursa disertai dengan Surat Pendaftaran Pendjualan jbs jang memuat pula Kurs jang dikehendaki. Kurs tersebut dapat dinjatakan dengan indikasi suatu kurs tertentu, ataupun

suatu limit terendah, ataupun Kurs „sebaik²nja”.

- b) Bagi pendjual² S.P.P. dari daerah jang diambil sebagai pedoman ialah kawat² Tjabang Bank Indonesia jang diterima di Kantor Pusat se-lambat²nja pada hari Sabtu jang mendahului dari Bursa.
- 3. a) S.P.P.2 jang diikuti sertakan dalam suatu hari Bursa tertentu hanya akan didjual atas dasar kurs jang terdjadi pada hari Bursa jang bersangkutan.
- b) S.P.P. jang pada hari Bursa jang bersangkutan tidak terdjual akan segera dikembalikan kepada jbs. ketjuali apabila pendjual menetapkan suatu djangka waktu pendjualan tertentu jang menjakup kemungkinan untuk mengikut sertakan dalam lebih dari satu kali Bursa.
- c) S.P.P.2 jang dikembalikan oleh BURSA karena transaksi tidak terdjadi, sedangkan pada saat itu S.P.P. tersebut telah habis waktu berlakunja, maka kepada pemilik jang bersangkutan masih diberi kesempatan untuk mendjualnja kepada Bank Indonesia dengan kurs jang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 4. Hasil pendjualan S.P.P. selambat-lambatnja pada hari Djum'at berikutnja sudah dapat diterima oleh pihak pendjual. Untuk pendjual² dari daerah maka hasil pendjualan akan ditransfer dengan T.T. tanpa ongkos.
- 5. Untuk perantaraan pendjualan ini Bank Indonesia memperhitungkan ½ % komisi terhitung dari seluruh hasil pendjualan S.P.P. jbs.

PEMBELIAN :

- 1. Setiap pembeli harus mengisi Surat Pendaftaran, dalam mana harus diisi;
 - a. nama pembeli beserta Angka Pengenal sebagai Importir atau Eksportir;
 - b. djumlah Nilai Transaksi Rupiah;
 - c. kurs pembelian jang dikehendaki.Surat² Pendaftaran pembelian jang tidak memuat salah satu keterangan tersebut dalam a s/d c tersebut diatas dianggap tidak sah dan batal.
- 2. Pembeli dapat menjatakan kurs jang diinginkan dengan memberikan indikasi suatu kurs tertentu. Pemasangan kurs „sebaik-baiknja” tidak diperkenankan.
- 3.a. Para pembeli S.P.P. dapat menjalurkan surat pendaftaran pembelinnja melalui bank² pemerintah dan/atau bank² swasta dengan menjetorkan seluruh harga pembelinnja pada bank jbs.
- b. Oleh Bank jbs. surat² pendaftaran pembelian tersebut, jang masing² harus dilampiri dengan

kwitansi penjetoran atau nota kredit sebesar seluruh harga pembeliannya diteruskan kepada Bank Indonesia melalui teromol Bursa seperti diuraikan dalam sub *Umum* diatas.

- c. Seluruh djumlah harga pembelian S.P.P. jang surat² pendaftarannya disalurkan melalui Bank² lain ketjuali Bank Indonesia, oleh bank masing² wadajib disetor pada Bank Indonesia dengan satu giro biljet jang ditarik oleh bank jbs. atas rekeningnya pada Bank Indonesia untuk kredit rekening „Dana S.P.P.”.
- d. Para pembeli S.P.P. jang menjalurkan surat pendaftaran pembeliannya melalui Bank Indonesia harus melakukan penjetorannya dengan uang tunai atau dengan biljet giro jang ditarik atas rekeningnya pada Bank Indonesia untuk rekening „Dana S.P.P.”.

- 4. Para pembeli jang tidak memperoleh pembagian atau hanja memperoleh sebagian dari djumlah S.P.P. jang diinginkannya akan menerima kembali uang penjetorannya sisanja dalam waktu satu minggu.
- 5. Bagi pembeli² S.P.P. jang bertempat tinggal di daerah, jang diambil sebagai pedoman ialah kawat² tjabang Bank Indonesia jang diterim di Kantor Pusat pada hari Sabtu jang mendahului hari Bursa.
- 6. Untuk perantaraan ini Bank Indonesia akan memperhitungkan 1% (satu persen) komisi tehitung dari seluruh hasil pembelian S.P.P. jang bersangkutan.

Demikian pengumuman Bank Indonesia.

Lampiran Pengumuman BLLD
No./ 9/Imp./65, tgl. 13-5-'65

Bank (Kode) :
Nomor Urut :
Tanggal :

SURAT PENGANTAR PERNJATAAN IMPOR (P.I.)

Kepada : BIRO LALU LINTAS DEWISA
di :

Bersama ini disampaikan P.I.² sebagai tersebut di bawah ini. Tembusan S.P. ini harap dikembalikan kepada kami sebagai tanda-terima.

..... (Ban

Tanda tangan.

Lampiran 1 — Peng. BLLD NO.

No. Urut	No. Registrasi oleh Bank	No. Urut	No. Registrasi oleh Bank

No. P.I. dari B.L.L.D.

No. : s/d No. :

**NETAPAN HARGA PENJERAHAN BARANG² EKSPOR GOL. III JANG BERLAKU
DARI TANGGAL 24 MEI s/d 19 DJUNI 1965
NO. 28/HP/65**

TIKAR PURUN PER 100 LEMBAR.

a. ukuran 110 × 70 cm.	DM.	53,—
b. ukuran 115 × 75 cm.	DM.	57,—
c. ukuran 120 × 80 cm.	DM.	65,—

TIKAR PANDAN PER 100 LEMBAR.

ukuran 140 × 70 cm. kwaliteit halus.	DM.	70,—
ukuran 140 × 70 cm. kwaliteit sedang.	DM.	60,—
ukuran 140 × 70 cm. kwaliteit kasar.	DM.	53,—

TIKAR ROTAN KASAR PER KODI.

ukuran 150 × 180 cm. kwaliteit kasar.	DM.	71,—
---	-----	------

TOPI BAMBU PER LUSIN.

ukuran 25 × 27 cm.		
No. 1	Br. pence	138,—
No. 2	Br. pence	147,—
No. 3	Br. pence	161,—
No. 4	Br. pence	167,—

TOPI PANDAN PER LUSIN.

a. Code O ukuran 11-13 intji I/II	US\$.	0,77
b. Code OO ukuran 11-13 intji I/II	US\$.	0,75
c. Code OOOA ukuran 11-13 intji I/IIA	US\$.	0,56
d. Code OOO ukuran 10-12 intji I/IA	US\$.	0,44
e. Code OOO ukuran 10-13 intji I/IIA	US\$.	0,47
f. Code OOOO ukuran 11-13 intji	US\$.	0,46

6. TOPI PANDAN SPLIT PER LUSIN.

ukuran 11 — 13 intji.		
No. 1	US\$.	0,78
No. 2	US\$.	0,88
No. 3	US\$.	0,98
No. 4	US\$.	1,08
No. 5	US\$.	1,18
No. 6	US\$.	1,28
No. 7	US\$.	1,38
No. 8	US\$.	1,48

7. TROCA-SHEELS PER 100 KG.

kwaliteit I.	DM.	96,—
kwaliteit II.	DM.	78,—
kwaliteit II	HK\$.	125,—

8. DAUN KUMIS KUTJING PER

KWINTAL.	DM.	88,—
---------------	-----	------

9. BATU LAGA EX DJAWA/

MADURA PER KWINTAL. kwaliteit II	HK\$.	125,—
---	-------	-------

DJAKARTA, 22 MEI 1965.

PIMPINAN
BIRO LALU LINTAS DEWISA
DIREKTORIUM

t.t.d.

R. A. KARTADJOEMENA.

enis barang-barang.....

urip pos nomor.	Tarip pos nomor.	Tarip pos nomor.	Tarip pos nomor.
836 - II.	853	885 - I-II (hanja untuk	termasuk gol.
837 - I.	854	wetenschap-	II).
838 - I a.	859 I- IIIa.	pelijke doe-	908 - III a.
839 - II b	861	leinden).	
845	862	886 - I b.	Keterangan :
847 (hanja untuk ke-	863	891	* Hanja spare-parts
dokteran dan la-	866	900 - I.	** Setelah mendengar
boratorium).	867	901 - I.	advis dari Gubernur/
848 (847 s/d 850 hanja	869	903 - I.	Kepala Daerah un-
dengan izin Dep.	870	908 - I (hanja jang ter-	tuk dipergunakan di
Kes.)	871	masuk gol. II) -	Daswati bersangkutan.
850	872	II b (hanja jang	
852	878 - I		Djakarta, 17 Mei 1965.

SEKSI EKSPOR/TJABANG DIREKTORAT EKSPOR DAERAH DIBE- RI WEWENANG PENUH UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN

Penetapan harga penjerahan barang² ekspor golongan III yakni hasil bumi/barang ekspor tertentu dari Hasil Hutan, Bahan Makanan/makanan ternak, Getah-getah, Rempah²/Obat²an, Hewan/kulit/Tulang dll. minjak/Bidji² mengandung minjak, Hasil kerajinan, Bahan Penjamak, Buah-buahan/Bunga² dan lain hasil ekspor, sesuai dengan keputusan Biro Lalu Lintas Devisa No. 3/BUD/HP/Instruksi/65 tgl. 26 April 1965, untuk sementara waktu oleh Kepala Direktorat Ekspor ditetapkan ketentuan² sebagai berikut.

Untuk penutupan kontrak valuta dari hasil² bumi/barang² ekspor tertantam dalam *daftar terlampir*, para eksportir yang bersangkutan diharapkan datang kepada Seksi Direktorat Ekspor (jang berkedudukan ditiap-tiap ibukota Daswati I) dan Tjabang Direktorat Ekspor (terdapat di pelabuhan² tertentu) guna mengajukan harga penjerahannya untuk mendapatkan persetujuan.

Jang dimaksud dengan harga penjerahan itu adalah harga fobnetto tanpa fleksibilitas dan claim apapun, seperti halnya dengan harga² penjerahan jang ditetapkan oleh Biro Lalu Lintas Devisa sedjak tgl. 13 Pebruari 1965 j.l.

Tiap harga penjerahan jang diajukan oleh eksportir² untuk semua negara tudjuan, kepada

Seksi Direktorat Ekspor (jang berkedudukan ditiap-tiap ibukota Daswati I) dan Tjabang Direktorat Ekspor (terdapat di pelabuhan² tertentu) diberi wewenang penuh untuk mengambil keputusan.

Atas harga penjerahan jang telah disetujui itu, maka blanco formulir E I akan diisi oleh penjabat² D.E.K.T. setempat.

Dengan formulir E I itu eksportir dapat menutup kontrak valuta pada Bank Devisa jang bersangkutan.

Berdasarkan bukti penutupan kontrak valuta dari Bank, selambat²-nja satu minggu Seksi Direktorat Ekspor (jang berkedudukan ditiap-tiap ibukota Daswati I) dan Tjabang Direktorat Ekspor (terdapat di pelabuhan² tertentu) dapat mengeluarkan surat izin ekspornja, dengan tetap memperhatikan ketentuan² umum jang masih tetap berlaku.

Ketentuan² tersebut diambil berdasarkan pertimbangan dekonsentrasi wewenang kedaerah dan berhubung dengan kebidjaksanaan Pemerintah untuk mendorong ekspor hasil² bumi/barang kelas III.

LAMPIRAN INSTRUKSI No. 1547/ph/k/65 TGL. 26 APRIL 1965.

A. HASIL LAUT :

1. A g a r²
2. Rumput Laut
3. Kerang² (ketjuala dari Sulawesi/Ambon)
4. Teripang
5. Akar Bakar
6. Daging Lola
7. Sisik (Kulit penju).

B. HASIL HUTAN :

1. Kaju Tjendana/Gahara
2. Kaju Bakar
3. Arang Kaju
4. Hati Rotan
5. Kemenjan
6. Bambu
7. Damar Hitam, Hiru, Daging.

C. BAHAN MAKANAN/Makanan ternak :

1. Dedak Djagung
2. Dedak (beras)
3. Katjang Hidjau
4. Katjang Kedele
5. Sarang Burung
6. Tepung Sagu
7. Widjan.

D. G E T A H² :

1. Djelutung
2. Djernang
3. Hangkang
4. Katiau

E. PELAPAH²/OBAT²AN :

1. A s a m
2. Bawang Merah
3. Bawang Putih
4. Kapologo
5. Kamukus
6. Lombok Kering
7. Tjabe Djawa
8. Biga

F. HEWAN/KULIT/TULANG DLL. :

1. Kuku binatang
2. Kulit Buaja dan Biawak dalam keadaan basah
3. Tanduk² binatang
4. Kulit Kodok
5. Kulit Ular

MINJAK/BIDJI² MENGANDUNG MINJAK.

1. Bungkil katjang tanah
2. Bungkil kelapa sawit.
3. Gemuk binatang.
4. Minjak katjang tanah
5. Kemiri.

HASIL KERADJINAN :

1. Ukiran² kaju
2. Bahan² tenunan. (sarung kain) harga dari D X.
3. Batik.

I. BAHAN PENJAMAK :

1. Kulit bakau

J. BUAH-BUAHAN/BUNGA² :

1. Buah-buahan.
2. Kolang-kaling.

K. LAIN HASIL EKSPOR :

1. Pupuk hidjau
2. Akar tuba.
3. Atap - Kadjang.
4. Lilin Lebah.

**NILAI IZIN EKSPOR SEMENTARA
BULAN MARET 1965**

Berdasarkan atas angka² jang dikumpulkan oleh Direktorat Ekspor, nilai idzin ekspor sementara berdasarkan penutupan kontrak valuta jang diselenggarakan oleh Kantor² Tjabang B.L.L.D. di daerah² jang diberikan selama bulan Djanuari s.d Maret 1965 mentjapai djumlah Rp. 5830,7 juta, dengan perintjian sebagai berikut :

Januari 1964	—	Rp. 2.764,2
Februari	—	1.743,3
Maret	—	2.229,7
April	—	2.215,5
Mei	—	1.996,-
Juni	—	3.631,4
Juli	—	2.395,9
Agustus	—	2.343,1
September	—	1.781,6
Oktober	—	1.670,6
November	—	1.407,1
Desember	—	2.530,1
Januari 1965	—	1.904,8
Februari	—	1.907,-
Maret	—	2.166,3

Djumlah tersebut dihitung berdasarkan 1 U.S. = Rp. 45,-

Angka² sementara ini tidak meliputi minjak tanah dan hasil²nja.

Djakarta, 10 Mei 1965

**PENETAPAN HARGA PENJERAHAN
BARANG² EKSPOR GOL. I
NO. 26/HP 65.**

Berlaku dari tgl. 24 s'd 29 Mei 1965

KARET PER POUND

RSS. I	US. \$.	sen 21 1/8
RSS. II	US. \$.	sen 20 7/8
RSS. III	US. \$.	sen 19 1/8
RSS. IV	US. \$.	sen 17 3/4
RSS. V	US. \$.	sen 14 1/2
THIN PALE CREPE I	US. \$.	sen 20 3/4
THIN PALE CREPE II	US. \$.	sen 19 5/8
THIN PALE CREPE III	US. \$.	sen 18 1/4
BROWN 1 X	US. \$.	sen 15 1/4
BROWN 2 X	US. \$.	sen 14
BROWN 3 X	US. \$.	sen 12 5/8
BLANKET C	US. \$.	sen 11 3/4
BLANKET D	US. \$.	sen 10 1/8
REMILLED 3	US. \$.	sen 11 3/4
REMILLED 4	US. \$.	sen 10 1/8
FLATBARK CREPE	US. \$.	sen 7 1/8
CUTTINGS A	US. \$.	sen 18 1/4
CUTTINGS B	US. \$.	sen 16 1/2
CUTTINGS C	US. \$.	sen 13 7/8
SMOKED BLANKET I	US. \$.	sen 13 1/4
SMOKED BLANKET II	US. \$.	sen 12 1/16

Djakarta, 22 Mei 1965.

PIMPINAN
BIRO LALU LINTAS DEvisa
DIREKTORIUM

ttd.

R.A. Kartadjoemena
Ketua

PENETAPAN HARGA PENJERAHAN BARANG² EKSPOR GOLONGAN II NO. 27/HP/65.

BERLAKU DARI TGL. 24 s/d 5 DJUNI 1965.

1. **COPAL MALENGKET Per Kwintal.**

kwaliteit P.W.S. Nf.	90,—
kwaliteit M.A.P. Nf.	77,—
kwaliteit W.S. Nf.	80,—
kwaliteit W.S. (Batjan) Nf.	65,—
kwaliteit L.A.S. Nf.	38,—
kwaliteit M.A. Nf.	25,—
kwaliteit M.B. Nf.	19,—
2. **COPAL LOBA Per Kwintal.**

kwaliteit A Nf.	88,—
kwaliteit B Nf.	79,—
kwaliteit C. 1. Nf.	75,—
kwaliteit C. 2. Nf.	66,—
kwaliteit D Nf.	61,—
kwaliteit D.B.B. Nf.	57,—
kwaliteit E Nf.	53,—
kwaliteit I Nf.	48,—
kwaliteit Dust Nf.	13,—
3. **KULIT KERBAU Intermediate Per Kwintal.**

berat 8 — 10 kg DM.	200,—
berat 10 — 13 kg DM.	204,—
berat 13 — 16 kg DM.	210,—
berat 16 — 20 kg DM.	218,—
berat 20 — up DM.	222,—
4. **KULIT KERBAU Second Per kwintal.**

berat 8 — 10 kg DM.	140,—
berat 10 — 13 kg DM.	142,—
berat 13 — 16 kg DM.	147,—
berat 16 — 20 kg DM.	152,—
berat 20 — up DM.	155,—
5. **KULIT KERBAU Pickers Per Kwintal.**

berat 8 — 10 kg DM.	113,—
berat 10 — 13 kg DM.	117,—
berat 13 — 16 kg DM.	123,—
berat 16 — 20 kg DM.	131,—
berat 20 — up DM.	139,—
6. **KULIT KAMBING Ukuran 70 — 100 cm First Per Lembar.**

berat average 34 kg (per 100 lembar) Br. pence	54
berat average 37 kg (per 100 lembar) Br. pence	57
berat average 40 kg (per 100 lembar) Br. pence	60
berat average 50 kg (per 100 lembar) Br. pence	70
berat average 60 kg (per 100 lembar) Br. pence	80
berat average 65 kg (per 100 lembar) Br. pence	85
berat average 70 kg (per 100 lembar) Br. pence	90
7. **KULIT KAMBING Ukuran 70 — 100 cm Seconds Per Lembar.**

berat average 34 kg (per 100 lembar) Br. pence	40½
berat average 37 kg (per 100 lembar) Br. pence	42¾
berat average 40 kg (per 100 lembar) Br. pence	45
berat average 50 kg (per 100 lembar) Br. pence	52½
berat average 60 kg (per 100 lembar) Br. pence	60
berat average 65 kg (per 100 lembar) Br. pence	63¾
berat average 70 kg (per 100 lembar) Br. pence	67½
8. **GULIT GIBAS Ukuran 70 — 100 cm First Per Lembar.**

berat average 50 kg (per 100 lembar) Br. pence	50
berat average 60 kg (per 100 lembar) Br. pence	60
berat average 70 kg (per 100 lembar) Br. pence	70
9. **KULIT GIBAS Ukuran 70 — 100 cm Seconds Per Lembar.**

berat average 50 kg (per 100 lembar) Br. pence	37½
berat average 60 kg (per 100 lembar) Br. pence	45
berat average 70 kg (per 100 lembar) Br. pence	52½
10. **KOPI ROBUSTA Per Kg.**

EK. I DM.	1.11
EK. II DM.	1.05
EK. III DM.	1.01
20/25% DM.	0.99
AP. I DM.	1.14
AP. II DM.	1.00
GB. 10/12% DM.	0.96
JAVA W.I.B./I DM.	1.62
11. **KOPI ARABICA Per Kg**

Sumatera/Sibolga D.P. DM.	2.73
Java W.I.B./I DM.	3.52
Java W.I.B./SUP. DM.	3.70
Sulawesi Rantepao D.P. DM.	3.38
Sulawesi Kalosi D.P. DM.	3.78
Sulawesi Rantepao Triage DM.	2.02
Sulawesi Kalosi Triage DM.	2.27
12. **PALA KUPAS Per Kwintal.**

Siauw ABCD DM.	440,—
Siauw Rimpel DM.	410,—
Siauw BWP DM.	331,—
Papua ABC DM.	338,—
Papua BWP DM.	277,—
13. **PALA KUPAS Banda Bukan Siauw Per Kwintal.**

ABCD DM.	418,—
Rimpel DM.	390,—
BWP. DM.	315,—
14. **PALA PADANG BIDJO SARING Per Kwintal** US\$. 90,—
15. **PALA PADANG Per Kwintal** US\$. 47,—
16. **BUNGA PALA Per Kwintal.**

Siauw I DM.	550,—
Siauw Gruis I DM.	528,—
Siauw II DM.	508,—
Siauw Gruis II DM.	486,—
Papua I DM.	395,—
Papua Gruis I DM.	378,—
Papua II DM.	360,—
Papua Gruis II DM.	346,—
17. **VANILI Per Kg.**

kwaliteit ABC US\$.	5.79
kwaliteit cuttings US\$.	4.99
kwaliteit loose-cuts US\$.	4.99
18. **COPRA CAKES/CHIPS Per Kwintal (Kadar Minj. Max. 15%).**

copra cakes DM.	13,—
copra chips DM.	14,—
ground telquel chips/cakes DM.	13,—

Bersambung ke hal. 4

PENETAPAN HARGA PENJERAHAN BARANG² EKSPOR GOL. II.
NO. 27A/HP/65.

Berlaku dari tgl. 24 Mei s/d 5 Djuni 1965.

	Tudjuan :		Tudjuan :	
	Europa	Hongkong	Europa	Hongkong
1. Rotan pulut merah W & S per kwintal.				
kwaliteit I ukuran 3/5	DM. 75,—	HK\$. 128,—		
kwaliteit II ukuran 3/5	DM. 50,—	HK\$. 99,—		
kwaliteit III ukuran 3/5	DM. 23,—	HK\$. 38,—		
2. Rotan pulut merah unwashed per kwintal.				
kwaliteit I ukuran 3/5	—	HK\$. 125,—		
kwaliteit II ukuran 3/5	—	HK\$. 97,—		
kwaliteit III ukuran 3/5	—	HK\$. 37,—		
3. Rotan pulut putih W & S per kwintal.				
kwaliteit I ukuran 3/5	DM. 50,—	HK\$. 85,—		
kwaliteit II ukuran 3/5	DM. 18,—	HK\$. 35,—		
kwaliteit III ukuran 3/5	DM. 15,—	HK\$. 25,—		
4. Rotan pulut putih unwashed per kwintal.				
kwaliteit I ukuran 3/5	—	HK\$. 82,—		
kwaliteit II ukuran 3/5	—	HK\$. 32,—		
kwaliteit III ukuran 3/5	—	HK\$. 24,—		
5. Rotan sega W & S per kwintal				
kwaliteit I ukuran 4/11	DM. 80,—	HK\$. 142,—		
kwaliteit II ukuran 4/11	DM. 60,—	HK\$. 99,—		
kwaliteit III ukuran 4/11	DM. 35,—	HK\$. 64,—		
6. Rotan sega dewascher per kwintal.				
kwaliteit I ukuran 4/11	—	HK\$. 139,—		
kwaliteit II ukuran 4/11	—	HK\$. 97,—		
kwaliteit III ukuran 4/11	—	HK\$. 61,—		
7. Rotan djahab W & S per kwintal.				
kwaliteit I ukuran 8/11	DM. 60,—	HK\$. 199,—		
kwaliteit II ukuran 8/11	DM. 48,—	HK\$. 78,—		
kwaliteit halfhard ukuran 8/11	DM. 38,—	HK\$. 64,—		
kwaliteit III ukuran 8/11	DM. 30,—	HK\$. 57,—		
kwaliteit IV ukuran 8/11	DM. 20,—	HK\$. 42,—		
kwaliteit IV ukuran 4/81	DM. 27,—	HK\$. 52,—		
kwaliteit IV ukuran 11/16	DM. 16,—	HK\$. 32,—		
8. Rotan djahab unwashed per kwintal.				
kwaliteit I ukuran 8/11	—	HK\$. 97,—		
kwaliteit II ukuran 8/11	—	HK\$. 75,—		
kwaliteit halfhard ukuran 8/11	—	HK\$. 61,—		
kwaliteit III ukuran 8/11	—	HK\$. 54,—		
kwaliteit IV ukuran 8/11	—	HK\$. 39,—		
kwaliteit IV ukuran 4/8	—	HK\$. 52,—		
kwaliteit IV ukuran 11/16	—	HK\$. 28,—		
kwaliteit IV ukuran 4/11	—	HK\$. 45,—		
9. Rotan kooboo soft W & S per kwintal				
kwaliteit II ukuran 8/11	DM. 25,—	HK\$. 45,—		
kwaliteit III ukuran 8/11	DM. 15,—	HK\$. 29,—		
kwaliteit III ukuran 4/8	DM. 23,—	HK\$. 39,—		
kwaliteit III ukuran 11/16	DM. 14,—	HK\$. 24,—		
kwaliteit III ukuran 4/11	DM. 18,—	HK\$. 34,—		
kwaliteit III ukuran 8/16	DM. 16,—	HK\$. 28,—		
10. Rotan kooboo soft unwashed per kwintal.				
kwaliteit II ukuran 8/11	—	HK\$. 42,—		
kwaliteit III ukuran 8/11	—	HK\$. 27,—		
kwaliteit III ukuran 4/8	—	HK\$. 37,—		
kwaliteit III ukuran 11/16	—	HK\$. 22,—		
kwaliteit III ukuran 4/11	—	HK\$. 31,—		
kwaliteit III ukuran 4/16	—	HK\$. 25,—		
11. Rotan kooboo soft W & S per kwintal.				
kwaliteit halfhard ukuran 4/8	DM. 35,—	HK\$. 69,—		
12. Rotan kooboo soft unwashed per kwintal.				
kwaliteit halfhard ukuran 4/8	—	HK\$. 49,—		
13. Rotan tolakan (ex Kalimantan)	—	HK\$. 21,—		
14. Rotan tohiti W & S per kwintal.				
kwaliteit I ukuran 18/24	DM. 60,—	HK\$. 99,—		
kwaliteit II ukuran 18/24	DM. 55,—	HK\$. 92,—		
kwaliteit IIB ukuran 18/24	DM. 50,—	HK\$. 85,—		
kwaliteit III ukuran 13/24	DM. 44,—	HK\$. 77,—		
kwaliteit IIIB ukuran 18/24	DM. 32,—	HK\$. 59,—		
kwaliteit IV ukuran 18/24	DM. 20,—	HK\$. 42,—		
kwaliteit IV/B ukuran 18/24	DM. 18,—	HK\$. 32,—		
kwaliteit V ukuran 18/24	DM. 14,—	HK\$. 25,—		
kwaliteit V ukuran 24/30	DM. 12,—	HK\$. 21,—		
kwaliteit V ukuran 10/18	DM. 11,—	HK\$. 19,—		
kwaliteit V ukuran 30 up	DM. 9,—	HK\$. 15,—		
15. Rotan tohiti unwashed per kwintal.				
kwaliteit I ukuran 18/24	—	HK\$. 97,—		
kwaliteit II ukuran 18/24	—	HK\$. 89,—		
kwaliteit IIB ukuran 18/24	—	HK\$. 82,—		
kwaliteit III ukuran 18/24	—	HK\$. 74,—		
kwaliteit III/B ukuran 18/24	—	HK\$. 57,—		
kwaliteit IV ukuran 18/24	—	HK\$. 39,—		
kwaliteit IV/B ukuran 18/24	—	HK\$. 29,—		
kwaliteit V ukuran 18/24	—	HK\$. 22,—		
16. Rotan Anduru W & S per kwintal.				
kwaliteit I ukuran 4/8	DM. 26,—	HK\$. 51,—		
kwaliteit II ukuran 4/8	DM. 20,—	HK\$. 30,—		
kwaliteit III ukuran 4/8	DM. 14,—	HK\$. 27,—		
17. Rotan Anduru Unwashed per kwintal.				
kwaliteit I ukuran 4/8	—	HK\$. 48,—		
kwaliteit II ukuran 4/8	—	HK\$. 37,—		
kwaliteit III ukuran 4/8	—	HK\$. 24,—		
18. Rotan Lita W & S per kwintal.				
kwaliteit I ukuran 8/11	DM. 10,—	HK\$. 27,—		
kwaliteit II ukuran 8/11	DM. 8,—	HK\$. 27,—		
19. Rotan Lita Unwashed per kwintal.				
kwaliteit I ukuran 8/11	—	HK\$. 24,—		
kwaliteit II ukuran 8/11	—	HK\$. 14,—		
20. Rotan Datuk Merah W & S per kwintal.				
kwaliteit I ukuran 4/8	DM. 50,—	HK\$. 85,—		
kwaliteit II ukuran 4/8	DM. 38,—	HK\$. 62,—		
kwaliteit III ukuran 4/8	DM. 28,—	HK\$. 48,—		
kwaliteit IV ukuran 4/8	DM. 10,—	HK\$. 19,—		
21. Rotan Datuk Merah Unwashed per kwintal.				
kwaliteit I ukuran 4/8	—	HK\$. 82,—		
kwaliteit II ukuran 4/8	—	HK\$. 61,—		
kwaliteit III ukuran 4/8	—	HK\$. 45,—		
kwaliteit IV ukuran 4/8	—	HK\$. 17,—		
22. Rotan Datuk Putih W & S per kwintal.				
kwaliteit I ukuran 4/8	DM. 30,—	HK\$. 57,—		
kwaliteit II ukuran 4/8	DM. 23,—	HK\$. 42,—		
kwaliteit III ukuran 4/8	DM. 12,—	HK\$. 25,—		

	Tudjuan :			Tudjuan :	
	Europa	Hongkong		Europa	Hongkong
23. Rotan Datuk Putih Unwashed per kwintal.					
kwaliteit I ukuran 4 8	—	HK\$. 54,—		HK\$. 69,—	
kwaliteit II ukuran 4 8	—	HK\$. 39,—		HK\$. 48,—	
kwaliteit III ukuran 4 8	—	HK\$. 22,—		HK\$. 25,—	
24. Rotan Kendari Buton Unwashed per kwintal.					
kwaliteit I ukuran 3 7	—	HK\$. 104,—		HK\$. 42,—	
kwaliteit II ukuran 3 7	—	HK\$. 82,—		HK\$. 28,—	
kwaliteit III ukuran 3 7	—	HK\$. 57,—		HK\$. 24,—	
kwaliteit IV ukuran 3 7	—	HK\$. 28,—		HK\$. 15,—	
25. Rotan Kendari Buton W & S per kwintal.					
kwaliteit I ukuran 3 7	DM. 65,—	HK\$. 107,—		HK\$. 39,—	
kwaliteit II ukuran 3 7	DM. 50,—	HK\$. 85,—		HK\$. 25,—	
kwaliteit III ukuran 3 7	DM. 32,—	HK\$. 59,—		HK\$. 21,—	
kwaliteit IV ukuran 3 7	DM. 12,—	HK\$. 31,—		HK\$. 12,—	
26. Rotan Manuk W & S per kwintal.					
kwaliteit I ukuran 10 12	DM. 5,—	HK\$. 12,—			
27. Roton Manuk Unwashed per kwintal	—	HK\$. 9,—			
28. Rotan Saputan W & S per kwintal.					
kwaliteit III ukuran 8 12	DM. 20,—	HK\$. 42,—			
kwaliteit IIIB ukuran 8 12	DM. 19,—	HK\$. 41,—			
kwaliteit IV ukuran 8 12	DM. 17,—	HK\$. 37,—			
kwaliteit IV B ukuran 8 12	DM. 12,—	HK\$. 29,—			
kwaliteit V ukuran 8 12	DM. 10,—	HK\$. 25,—			
29. Rotan Sabutan Unwashed per kwintal.					
kwaliteit III ukuran 8 12	—	HK\$. 39,—		HK\$. 67,—	
kwaliteit III B ukuran 8 12	—	HK\$. 38,—		HK\$. 59,—	
kwaliteit IV ukuran 8 12	—	HK\$. 34,—		HK\$. 51,—	
kwaliteit IV B ukuran 8 12	—	HK\$. 27,—		HK\$. 41,—	
kwaliteit V ukuran 8 12	—	HK\$. 22,—		HK\$. 27,—	
30. Rotan Selutup (Serawak) W & S per kwintal.					
kwaliteit I ukuran 14 — up	DM. 55,—	HK\$. 92,—		HK\$. 18,—	
kwaliteit II ukuran 14 — up	DM. 26,—	HK\$. 51,—			
kwaliteit III ukuran 14 — up	DM. 17,—	HK\$. 28,—			
31. Rotan Selutup (Serawak) Unwashed per kwintal.					
kwaliteit I ukuran 14 — up	—			HK\$. 69,—	
kwaliteit II ukuran 14 — up	—			HK\$. 48,—	
kwaliteit III ukuran 14 — up	—			HK\$. 25,—	
32. Rotan Umbulu W & S per kwintal.					
kwaliteit I ukuran 10 24	DM. 25,—	HK\$. 42,—		HK\$. 42,—	
kwaliteit II ukuran 10 24	DM. 15,—	HK\$. 28,—		HK\$. 28,—	
kwaliteit II B ukuran 10 24	DM. 12,—	HK\$. 15,—		HK\$. 24,—	
kwaliteit III ukuran 10 24	—	HK\$. 15,—		HK\$. 15,—	
33. Rotan Umbulu Unwashed per kwintal.					
kwaliteit I ukuran 10 24	—	HK\$. 39,—		HK\$. 39,—	
kwaliteit II ukuran 10 24	—	HK\$. 25,—		HK\$. 25,—	
kwaliteit II B ukuran 10 24	—	HK\$. 21,—		HK\$. 21,—	
kwaliteit III ukuran 10 24	—	HK\$. 12,—		HK\$. 12,—	
34. Rotan Tarumpu W & S per kwintal.					
kwaliteit I ukuran 18 24	DM. 39,—	HK\$. 68,—		HK\$. 68,—	
kwaliteit II ukuran 18 24	DM. 34,—	HK\$. 62,—		HK\$. 62,—	
kwaliteit II B ukuran 18 24	DM. 28,—	HK\$. 54,—		HK\$. 54,—	
kwaliteit III ukuran 18 24	DM. 21,—	HK\$. 44,—		HK\$. 44,—	
kwaliteit III B ukuran 18 24	DM. 11,—	HK\$. 29,—		HK\$. 29,—	
kwaliteit III ukuran 10 18	DM. 16,—	HK\$. 32,—		HK\$. 32,—	
kwaliteit III ukuran 24 30	DM. 10,—	HK\$. 21,—		HK\$. 21,—	
35. Rotan Tarumpu Unwashed per kwintal.					
kwaliteit I ukuran 18 24				HK\$. 67,—	
kwaliteit II ukuran 18 24				HK\$. 59,—	
kwaliteit II B ukuran 18 24				HK\$. 51,—	
kwaliteit III ukuran 18 24				HK\$. 41,—	
kwaliteit III B ukuran 18 24				HK\$. 27,—	
kwaliteit III ukuran 10 24				HK\$. 29,—	
kwaliteit III ukuran 24 30				HK\$. 18,—	

Djakarta, 22 Mei 1965.

(Sambungan dari hal. 38)

19. MINJAK ETERIS Per Lb.					
minjak sereh minimum 85/35%	Br. pence 39				
minjak nilam kwaliteit I	Br. pence 159				
minjak nilam kwaliteit II	Br. pence 146				
minjak cananga ester 20 up	Br. pence 172				
minjak akar wangi	E.£. 2/-/-				
20. KATJANG TANAH KUPAS Per Kwintal					
m e r a h	DM. 55,—				
p u t i h	DM. 64,—				
21. KATJANG TANAH BERKULIT Per Metric Ton	US\$. 90,—				
22. INDJUK DIPILIH DIPOTONG BASIS STANDAARD 30/90 cm per metric ton ...	E.£. 210/9/6				
23. BIDJI KAPOK Per Metric Ton.					
in bulk	E.£. 12/2/1				
in bags	E.£. 14/5/3				
24. AMPAS TAPIOCA Per Kwintal (Kadar Pati Max. 73%).					
ampas tapioca	DM. 4.50				
tepung ampas tapioca	DM. 5.40				
25. GAPLEK Per Kwintal.					
gaplek gelondong	DM. 6.—				
tepung gaplek	DM. 5.50				
26. TEPUNG TAPIOCA Per Kwintal.					
kwaliteit AAA	E.£. 1/3/-				
kwaliteit AA	E.£. 1/2/-				
kwaliteit A	E.£. 1/1/-				
27. PINANG Per Kwintal (Bukan Pinang Atjeh).					
sliced kwaliteit I	DM. 30,—				
kwaliteit II	DM. 24,—				
kwaliteit III	DM. 16,—				
splitz kwaliteit I	DM. 24,—				
kwaliteit II	DM. 17,—				
bulat putih	DM. 12,—				
bulat merah	DM. 11,—				
28. HEWAN HIDUP Per Ekor.					
sapi ex Bali	HK\$. 166.—				
sapi ex Banda Atjeh	HK\$. 140.—				
sapi ex Lombok	HK\$. 159.—				
sapi ex Sumba	HK\$. 117.—				
sapi ex Timor	HK\$. 105.—				
sapi ex Djawa Timur/Surabaja	HK\$. 110.—				
kerbau ex Bali	HK\$. 140.—				
kerbau ex Banda Atjeh	HK\$. 120.—				
kerbau ex Sumbawa Besar	HK\$. 152.—				
kerbau ex Lombok, Bima, Sumba, Flores	HK\$. 142.—				
kerbau ex Djawa Timur/Surabaja	HK\$. 107.—				
babi	HK\$. 35.—				
29. GAMBIR Per Kwintal.					
gambir kembang No. 1	E.£. 20/-/-				
gambir bulat	E.£. 17/-/-				
gambir persegi hitam (extrac)	E.£. 7 8 -				
30. DJAGUNG Per Metric Ton.					
kuning/putih	US\$. 25.—				
merah	US\$. 24.—				

Djakarta, 22 Mei 1965.

PIMPINAN
BIRO LALU LINTAS DEVISI
DIREKTORIUM
ttd.
R.A. KARTADJOEMENA

P.N. „PANTJA NIAGA“

Alamat : **Djalan Kramat Raya No. 94/96, Djakarta.**
Alamat Kawat : **C E N T R A D.**
Telepon : **O.G. 49891, 49892, 49893, 49894,**
48126, 48127, 48128.
Telex : **011208, 011291.**

USAHA - USAHA :

- a. **EKSPOR hasil bumi**, antara lain :
Karet, Kopra, Kopi, Gapek, Bidji-Bidji jang mengandung minyak, **Minyak Eteris, Rempah-Rempah** dan **Hasil Hutan.**
- b. **KOLEKSI barang-barang asal dari produksi rakjat /koperasi-koperasi/Perusahaan-Perusahaan Negara dan Perusahaan-Perusahaan lainnja.**
- c. **PERDAGANGAN barang-barang/bahan-bahan jang diperlukan untuk sektor produksi hasil bumi dan hasil produksi rakjat/koperasi-koperasi/Perusahaan-Perusahaan Negara dan lainnja untuk ekspor.**
- d. **SUPPLIER dari Tekstil, Benang Tenun, Barang-Barang Teknik, Barang-Barang Kimia, Obat-Obatan, Kertas d.l.l.**



T J A B A N G - T J A B A N G :

Djakarta, Bandung, Tjirebon, Semarang, Jogjakarta, Surabaja, Banda-Atjeh, Medan,
Padang, Palembang, Bandjar-Masin, Pontianak, Menado dan Makassar.

Anda ingin SUKSES dalam Perdagangan ?

Datangilah

P.N. PEMBANGUNAN NIAGA



**Aparat Revolusi dalam
bidang perdagangan :**

IMPOR

EKSPOR

KONTRAKTOR

PROJEK dan INDUSTRI

Untuk suksesnja usaha anda, harap berhubungan dengan :

P.N. PEMBANGUNAN NIAGA

Division² :

1. IMPOR BAHAN BANGUNAN
2. IMPOR ALAT² BESAR/MESIN²
3. IMPOR MESIN² SANDANG

Alamat :
Djl. Hajam Wuruk no. 127.
D J A K A R T A

Division² :

1. IMPOR SANDANG PANGAN
2. IMPOR BAHAN² CHEMICALIEN/PHARMASI
3. E K S P O R

Alamat :
Djl. Gadjah Mada no. 18.
D J A K A R T A

WARTA



Perdagangan

AP
W299
P433
18
3



3

TAHUN KE-XVIII
1 DJUNI 1965

MADJALAH MINGGUAN „WARTA PERDAGANGAN”

Diterbitkan oleh :

Departemen Perdagangan Dalam Negeri
beserta Urusan Perdagangan Luar Negeri
dari Kompartimen Luar Negeri/H.E.L.N.
dan Perdagangan Luar Negeri.

Pelindung :

J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/
Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri
BRIG. DJENDERAL A. JUSUF.

Pemimpin Umum :

Kepala Direktorat Marketing dan Research :
Ir. J. J. Pitoy M.A. econ.

Staf Redaksi :

Staf Direktorat Marketing dan Research.

Penanggung Jawab :

Kepala Seksi Publikasi Madjalah
Anwar B. Harahap.

Pembantu Tetap :

Prof. Ir. Teko Sumodiwirjo
Kolonel Jusuf Ranli
Major A. Rachman Rukmantara
R. Hertatijanto S.H.
Drs. Waskito
Dr. J. Panglaykim

Pembantu² Khusus :

Kolonel Usman Ismail
Major Drs. Sukadjat
Zahar
R. Isa
Drs. A. Aidit
Suprpto
Sudjadi
A. Karim Usman S.H.
Dudy Djaya

Alamat Redaksi dan Tata Usaha :

Madjalah „WARTA PERDAGANGAN”
Direktorat Marketing dan Research
Djalan Tanah Abang Timur No. 87
D J A K A R T A

Pelaksana/Pertjetakan :

Kepala Pertjetakan P.N. Karya Tjotas
Burdi Reksodirdjo.

Pembayaran uang langganan dilakukan dimuka dengan :

1. Penjetoran atas Rekening Madjalah
„Warta Perdagangan” Kode No: KB/
W.A.-194, pada Bank Indonesia —
Dj: Thamrin, Djakarta.
2. Dinas Giro dan Tjek Pos atau dengan
pos wissel jang langsung dialamatkan
kepada Tata Usaha Warta Perdagangan
Direktorat Marketing dan Research.

DAFTAR ISI

	Hal.
1. Kata Pengantar Redaksi	1
2. Lahirnja Pantja Sila	2
3. Ketetapan MPRS No. VII/1965	13
4. Ketetapan MPRS No. VIII 1965	13
5. Masalah Perentjanaan	17
6. Laporan Pelelangan Tembakau di Bremen (Hasil panen 1963)	20
7. Organisasi dan Susunan Direktorat Impor.	27
8. Organisasi dan Susunan Direktorat Peng- adaan dan Penjaluran	29
9. Organisasi dan Susunan BPU-Niaga	30
10. Reorganisasi P.T. Kapok Indonesia	31
11. Serah-terima Pimpinan P.T. Kapok	32
12. Badan ² Pengawas dan Direksi P.T. PEKSIN	33
13. Hak Counter impor bagi eksportir Daswati ² I Sumatra jang mengekspor Barang ² ter- tentu kepelabuhan Bebas Sabang	34
14. Ketentuan pelaksanaan djenis barang ² jang diimpor atas dasar Counter impor (Sabang)	35
15. Pimpinan Unit ² Khusus jang berada diba- wah pengawasan B.P.U.-Niaga	35
16. Tourist-Cheque	35
17. Penetapan Harga Penjerahan Barang ² Eks- por Gol. I	36
18. "Re-exchange" sisa ² rupiah ex. pendjualan valuta asing diperhitungkan	37
19. Daftar alamat ² GPEIS diseluruh Indonesia	38

WARTA PERDAGANGAN No. 4,

memuat antara lain :

1. Pembentukan Team teknis ekspor dipusat dan
didaerah.
2. Survey terhadap barang² impor atas beban
Devisa Negara.
3. Istilah-istilah tehnik.
5. d.l.l.

Keterangan Gambar kulit muka :

Menteri Brig. Djen. A. Jusuf dan Mente
Drs. Frans Seda, sedang meneliti lembara
tembakau pada pelelangan tembakau di
Bremen.

Surat Izin terbit No. 21A/SK/UPPG. SIT-
tanggall 17-4-1965.

Tanggal 1 Djuni adalah Hari Lahirnja Pantja Sila, Hari Lahirnja Falsafah Hidup dari rakjat, bangsa dan Negara Indonesia, sekarang telah dinjatakan setjara resmi oleh Pemerintah sebagai hari Besar Nasional. Sebagaimana Manipol telah menggariskan, Pantja Sila sebagai hasil galian dari bumi Indonesia, sebagai hasil penemuan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia kita, adalah lebih tinggi, adalah suatu "hogere optrekking" dari pada Manifesto Komunis dan Declaration of Independence. Presiden dalam pidatonja jang berdjjudul "To build the world anew" telah menegaskan bahwa Pantja Sila mengandung lebih banjak dari pada arti Nasional sadja, Pantja Sila mempunjai arti universil dan dapat digunakan dan dipraktekkan setjara internasional.

Prinsip-prinsip Demokrasi Terpimpin serta pengertian dasar, azas, tudjuan, fungsi dan tjiri-tjiri chasnja, telah dirumuskan dengan Ketetapan M.P.R.S. No. VII/1965. Dalam rangka mengsucceskan Revolusi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pada haluan negara dan haluan pembangunan jang pada hakekatnja djuga merupakan pedoman pelaksanaan dari pada Manifesto Politik Republik Indonesia baik untuk bidang dalam negeri maupun bidang luar negeri adalah Amanat²/Pidato² Presiden/Pemimpin Besar Revolusi: "GESURI, TAVIP, The Fifth Freedom our Weapon dan The Era of Confrontation", seperti ditetapkan dalam Ketetapan M.P.R.S. No. VII/1965.

Dalam taraf nation-building pada dewasa ini PERKATAAN "Perentjanaan" adalah suatu pengertian jang perlu direnungkan setjara prihatin; dalam nomor ini dihidangkan hasil karya kolektif dari para pengikut kursus jang diselenggarakan oleh BAPPENAS disekitar masalah pengertian "Perentjanaan".

Chususnja kepada para pengusaha dalam bidang perdagangan dalam negeri diperkenalkan Organisasi dan Susunan Direktorat Pengadaan dan Penjaluran dalam lingkungan Departemen Perdagangan Dalam Negeri, kepada para importir, Organisasi dan Susunan Direktorat Impor dalam lingkungan Urusan Perdagangan Luar Negeri; selandjutnja Susunan dan Organisasi B.P.U.-Niaga Negara dan nama² dari para Pres. Direktur dari Unit² khusus B.P.U.-Niaga Negara dapat djuga Sdr. mambatjanja dalam nomor ini. Disamping itu, djuga perlu diketahui kiranja susunan Pengawas dari P.T. PEKSIN jang telah disempurnakan, dimana Presiden/Pemimpin Besar Revolusi sendiri bertindak sebagai Pengawas Agung.

Laporan panitia pelelangan tembakau di Bremen perlu diketahui oleh dunia per-tembakauan di Indonesia pada umumnja dan lebih lagi dari itu, merupakan bahan² bagi Pemerintah untuk mengambil langkah² selandjutnja dalam menetapkan marketing policy jang setepat-tepatnja untuk memasarkan tembakau Indonesia dipasaran International.

Dalam rangka membangun pelabuhan bebas Sabang; dimuat dalam madjalah ini Keputusan Bersama Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri tentang hak counter-impor bagi eksportir jang mengekspor hasil² bumi/barang² tertentu dari pelabuhan Daerah Tingkat I Sumatera dengan tudjuan Sabang, dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan mengenai djenis barang² jang dapat diimpor atas dasar counter-impor.

Achirnja, ketentuan² dari Biro Lalu Lintas Devisa tentang Tourist-cheque dan "Re-exchange" sisa rupiah ex pendjualan valuta asing dapat djuga Sdr. menemukannja dalam madjalah ini.

Lahirnja Pantja Sila

Paduka tuan Ketua jang mulia!

Sesudah tiga hari ber-turut² anggota² Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai mengeluarkan pendapat²nja, maka sekarang saja mendapat keho:matan dari Paduka tuan Ketua jang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saja. Saja akan menetapi permintaan Paduka tuan Ketua jang mulia. Apakah permintaan Paduka tuan Ketua jang mulia? Paduka tuan Ketua jang mulia minta kepada sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saja kemukakan didalam pidato saja ini.

Maaf, beribu maaf! Banjak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal² jang sebenarnja bukan permintaan Paduka tuan Ketua jang mulia, jaitu bukan dasarnja Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saja, jang diminta oleh Paduka tuan Ketua jang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: „Philosophische grondslag” dari pada Indonesia Merdeka. Philosophische grondslag itulah pundamen, filsafat, pikiran-jang-sedalam-dalamnja, djiwa, hasrat-jang-sedalam-dalamnja untuk diatasnja didirikan gedung Indonesia Merdeka jang kekal dan abadi. Hal ini nanti akan saja kemukakan, Paduka tuan Ketua jang mulia, tetapi lebih dahulu izinkanlah saja membitjarkan, memberitahukan kepada tuan² sekalian, apakah jang saja artikan dengan perkataan „merdeka”.

Merdeka buat saja ialah: „political independence”, politieke onafhankelijkheid. Apakah jang dinamakan politieke onafhankelijkheid?

Tuan² sekalian! Dengan terus-terang sadja saja berkata: Tatkala Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai akan bersidang, maka saja, didalam hati saja banjak khawatir, kalau² banjak anggota jang — saja katakan didalam bahasa asing, maafkan perkataan ini — „zwaarwichtig” akan perkara jang ketjil². „Zwaarwichtig” sampai — kata orang Djawa — „djelimet”. Djikalau sudah membitjarkan hal jang ketjil² sampai djelimet, barulah mereka berani menjatakan kemerdekaan.

Tuan² jang terhormat! Lihatlah didalam sedjarah dunia, lihatlah kepada perdjalanan dunia itu.

Banjak sekali negara² jang merdeka, tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara² itu satu sama lain! Samakah isinja, samakah deradjatnja negara² jang merdeka itu? Djermania merdeka, Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok Merdeka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggeris merdeka, Rusia merdeka, Mesir merdeka. Namanja semuanya merdeka tetapi bandingkanlah isinja!

Alangkah berbedanja i s i itu! Djikalau kita berkata: Sebelum Negara merdeka, maka harus lebih dahulu ini selesai, itu selesai, itu selesai, sampai djelimet!, maka saja bertanja kepada tuan² sekalian kenapa Saudi Arabia merdeka, padahal 80% dari rakyatnja terdiri dari kaum Badui, jang sama sekali tidak mengerti hal ini atau itu.

Batjalah buku Armstrong jang menjeritakan tentang Ibn Saud! Disitu ternjata, bahwa tatkala Ibn Saud mendirikan pemerintahan Saudi Arabia, rakyat Arabia sebageian besar belum mengetahui bahwa otomobil perlu minum bensin. Pada suatu hari otomobil Ibn Saud dikasih makan gandum oleh orang² Badui di Saudi Arabia itu! Toch Saudi Arabia merdeka!

Lihatlah pula — djikalau tuan² kehendaki tjontoh jang lebih hebat — Sovjet Rusia! Pada masa Lenin mendirikan Negara Sovjet, adakah rakyat Sovjet sudah tjerdas? Seratus lima puluh miljun rakyat Rusia, adalah rakyat Musjik jang lebih daripada 80% tidak dapat membatja dan menulis bahkan dari buku² jang terkenal dari Leo Tolstoi dan Fülöp Miller, tuan² mengetahui betapa keadaan rakyat Sovjet Rusia pada waktu Lenin mendirikan negara Sovjet itu. Dan kita sekarang disini mau mendirikan negara Indonesia Merdeka. Terlalu banjak matjam² soal kita kemukakan.

Maaf, P.T. Zimukyokutyoo! Berdirilah saja punja bulu, kalau saja membatja tuan punja surat, jang minta kepada kita supaya dirantjangkan sampai djelimet hal ini dan itu dahulu semuanya! Kalau bena semua hal ini harus diselesaikan lebih dahulu, sampai djelimet, maka saja tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, tuan tidak akan mengalami Indonesia merdeka, kita semuanya tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, — sampai dilobang kubur!

Saudara²! Apakah jang dinamakan merdeka? Didalam tahun '33 saja telah menulis satu risalah. Risalah jang bernama „Mentjapai Indonesia Merdeka”. Maka didalam risalah tahun '33 itu, telah saja katakan, bahwa kemerdekaan, politieke onafhankelijkheid, political independence, tak lain dan tak bukan, ialah satu d j e m b a t a n, satu d j e m b a t a n e m a s. Saja katakan didalam kitab itu, bahwa d i s e b e r a n g n j a djembatan itulah kita sempurnakan kita punja masyarakat.

Ibn Saud mengadakan satu negara didalam satu malam, — in one night only! —, kata Armstrong didalam kitabnja. Ibn Saud mendirikan Saudi Arabia Merdeka disatu malam sesudah ia masuk kota Riad dengan 6 orang! S e s u d a h „djembatan” itu ditetapkan oleh Ibn Saud, maka d i s e b e r a n g n j a djembatan artinja k e m u d i a n d a r i p a d a i t u, Ibn Saud barulah memperbaiki masyarakat.



Presiden / Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno :

..... marilah kita selalu berpegang teguh pada 3 pokok pengertian dari Pantja Sila, ialah :

1. Pantja Sila sebagai pemerasan kesatuan jiwa Indonesia.
2. Pantja Sila sebagai manifestasi persatuan bangsa dan wilayah Indonesia.
3. Pantja Sila sebagai Weltanschauung bangsa Indonesia dalam penghidupan nasional dan internasional.

Tjamankan Pantja Sila.

Saudi Arabia. Orang jang tidak dapat membuat di-wadjabkan beladjar membuat, orang jang tadinja bergelandangan sebagai nomade jaitu orang Badui, diberi peladjaran oleh Ibn Saud djangan bergelandangan, dikasih tempat untuk bertjotjok-tanam. Nomade dirubah oleh Ibn Saud mendjadi kaum tani, — semuanya diseberang djembatan.

Adakah Lenin ketika dia mendirikan negara Sovjet Rusia Merdeka, telah mempunyai Djnepprostoff, dan jang maha besar disungai Djneppr? Apa ia telah mempunyai radio-station, jang menjundul ke-angkasa? Apa ia telah mempunyai kereta² api tjukup, untuk meliputi seluruh negara Rusia? Apakah tiap² orang Rusia pada waktu Lenin mendirikan Sovjet Rusia Merdeka telah dapat membuat dan menulis? Tidak, tuan² jang terhormat! Diseberang djembatan emas jang diadakan oleh Lenin itulah, Lenin baru mengadakan radio station, baru mengadakan sekolah, baru mengadakan Creche, baru mengadakan Djnepprostoff! Maka oleh karena itu saja minta kepada tuan² sekalian, djanganlah tuan² gentar didalam hati, djanganlah mengingat bahwa ini dan itu lebih dahulu harus selesai dengan djelimet, dan kalau sudah selesai, baru kita dapat merdeka. Alangkah berlainannya tuan² punja semangat, — djikalau tuan² demikian —, dengan semangat pemuda² kita jang 2 miljun banjaknja. Dua miljun pemuda ini menjampai seruan pada saja, 2 miljun pemuda ini semua berhasrat Indonesia Merdeka Sekarang!

Saudara², kenapa kita sebagai pemimpin rakjat, jang mengetahui sedjarah, mendjadi zwaarwichtig, mendjadi gentar, padahal sembojan Indonesia Merdeka bukan sekarang sadja kita siarkan? Ber-puluh² tahun jang lalu, kita telah menjiarkan sembojan Indonesia Merdeka, bahkan sedjak tahun 1932 dengan njata² kita mempunyai sembojan „INDONESIA MERDEKA SEKARANG”. Bahkan 3 kali sekarang, jaitu Indonesia Merdeka s e k a r a n g, s e k a r a n g, s e k a r a n g!

Dan sekarang kita menghadapi kesempatan untuk menjusun Indonesia Merdeka, — kok lantas kita zwaarwichtig dan gentar hati! Saudara², saja peringatkan sekali lagi, Indonesia Merdeka, political independence, politieke onafhankelijkheid, tidak lain dan tidak bukan ialah satu d j e m b a t a n! Djangan gentar! Djikalau umpamanja kita pada saat sekarang ini diberikan kesempatan oleh Dai Nippon untuk merdeka, maka dengan mudah Gunseikan diganti dengan orang jang bernama Tjondro Asmoro, atau Soomubutyoo diganti dengan orang jang bernama Abdul Halim. Djikalau umpamanja Butyoo² diganti dengan orang² Indonesia, pada sekarang ini, sebenarnya kita telah mendapat political independence, politieke onafhankelijkheid, — in one night, didalam satu malam!

Saudara², pemuda² jang 2 miljun, semuanya bersembojan : Indonesia Merdeka, s e k a r a n g! Djikalau umpamanja Balatentera Dai Nippon sekarang menjerahkan urusan negara kepada saudara², apakah saudara² akan menolak, serta berkata : mangke rumijin, tunggu dulu, minta ini dan itu se-

lesai dulu, baru kita berani menerima urusan negara Indonesia Merdeka? (Seruan : Tidak! Tidak!).

Saudara², kalau umpamanja pada saat sekarang ini Balatentera Dai Nippon menjerahkan urusan negara kepada kita, maka satu menitpun kita tidak akan menolak, s e k a r a n g p u n kita menerima urusan itu, s e k a r a n g p u n kita mulai dengan negara Indonesia jang Merdeka!

Saudara², tadi saja berkata, ada perbedaan antara Sovjet Rusia, Saudi Arabia, Inggeris, Amerika dan lain² tentang isinja : tetapi ada satu jang s a m a jaitu, rakjat Saudi Arabia sanggup m e m p e r t a h a n k a n negaranya. Musjik² di Rusia sanggup mempertahankan negaranya. Rakjat Amerika sanggup mempertahankan negaranya. Rakjat Inggeris sanggup mempertahankan negaranya. Inilah jang mendjadi minimum-eis. Artinja kalau ada ketjaka-pan jang lain, tentu lebih baik, tetapi manakala sesuatu bangsa telah sanggup m e m p e r t a h a n k a n negerinja dengan darahnja sendiri, dengan dagingnja sendiri, pada saat itu bangsa itu telah masak untuk kemerdekaan. Kalau bangsa kita, Indonesia, walaupun dengan bambu runtjing, saudara², semua siap-sedia mati, mempertahankan tanah air kita Indonesia, pada saat itu bangsa Indonesia adalah siap-sedia, masak untuk Merdeka.

Tjobalah pikirkan hal ini dengan memperbandingkan dengan manusia. Manusia pun demikian, saudara²! Ibaratnja, kemerdekaan saja bandingkan dengan perkawinan. Ada jang berani kawin, leka, berani kawin, ada jang takut kawin. Ada jang berkata : Ah, saja belum berani kawin, tunggu dulu, gadjih f. 500. Kalau saja sudah mempunyai rumah gedung, sudah ada permadani, sudah ada lampu listrik, sudah mempunyai tempat-tidur jang mentu, sudah mempunyai medja-kursi jang se-lengkap², sudah mempunyai sendok-garpu perak satu kaset, sudah mempunyai ini dan itu, bahkan sudah mempunyai kinder-uitzet, barulah saja berani kawin.

Ada orang lain jang berkata : saja sudah berani kawin kalau saja sudah mempunyai medja satu, kaset empat, jaitu „medja makan”, lantas satu zitje, lantas satu tempat tidur.

Ada orang jang lebih berani lagi dari itu, jang saudara² Marhaen! Kalau dia sudah mempunyai bug sadja dengan satu tikar, dengan satu periuk, dia kawin. Marhaen dengan satu tikar, satu gubuk kawin. Sang klerk dengan satu medja, empat kaset, satu zitje, satu tempat tidur : kawin.

Sang Nodoro jang mempunyai rumah gedung electriche kookplaat, tempat tidur, uang bertimbitimbin : kawin. Belum tentu mana jang lebih gelig, belum tentu mana jang lebih bahagia, Sang Nodoro dengan tempat tidurnja jang mentu², a Sarinem dan Samiun jang hanya mempunyai satu tikar dan satu periuk, saudara²! Tekad hatinja jang perlu, tekad hatinja Samiun kawin dengan satu t i k a r dan satu periuk, dan hati Sang Nodoro jang baru berani kawin kalau sudah mempunyai gercer satu kaset plus kinderuitzet, — buat 3 tahun lama!

Saudara², soalnya adalah demikian: — k i t a
ni berani merdeka atau tidak?
Inilah, saudara² sekalian, Paduka tuan Ketua jang
mulia, ukuran saja jang terlebih dulu saja kemukakan
sebelum saja bitjarakan hal² jang mengenai dasarnya
satu negara jang merdeka. Saja mendengar uraian
P.T. Soetardjo beberapa hari jang lalu, tatkala men-
jawab apakah jang dinamakan merdeka, beliau
mengatakan: kalau tiap² orang didalam hatinja te-
lah merdeka, itulah kemerdekaan. Saudara², djika
ia p² orang Indonesia jang 70 miljun ini lebih dulu
harus merdeka didalam hatinja, sebelum kita dapat
mentjapai political independence, saja ulangi lagi
sampai lebur kiamat kita belum dapat Indonesia
Merdeka!

Di d a l a m Indonesia Merdeka itulah kita m e-
n e r d e k a k a n rakjat kita! Di d a l a m Indo-
nesia Merdeka itulah kita m e m e r d e k a k a n
hatinja bangsa kita! Di d a l a m Saudi Arabia
Merdeka, Ibn Saud m e m e r d e k a k a n rakjat
Arabia satu persatu. Di d a l a m Sovjet-Rusia
Merdeka Stalin m e m e r d e k a k a n hati
bangsa Sovjet-Rusia satu persatu.

Saudara²! Sebagai djuga salah seorang pemitjara
berkata: Kita bangsa Indonesia tidak sehat badan,
banjak penjakit malaria, banjak dysentrie, banjak
penjakit hongerudeem, banjak ini banjak itu. „Sehat-
an dulu bangsa kita, baru kemudian merdeka”.

Saja berkata, kalau inipun harus diselesaikan le-
bih dulu, 20 tahun lagi kita belum merdeka. Di d a-
l a m Indonesia Merdeka itulah kita menjehatkan
rakjat kita walaupun misalnja tidak dengan kinine,
tapi kita kerahkan segenap masjarakat kita untuk
menghilangkan penjakit malaria dengan menanam
setepeng kerbau. Di d a l a m Indonesia Merdeka
kita melatih pemuda kita agar supaja mendjadi kuat,
di d a l a m Indonesia Merdeka kita menjehatkan
rakjat sebaik-baiknya. Inilah maksud saja dengan
perkataan „djembatan”. Diseberang djembatan,
j e m b a t a n e m a s, inilah, baru kita l e l u s
sa menjusun masjarakat Indonesia Merdeka jang
kuat, sehat, kekal dan abadi.

Tuan² sekalian! Kita sekarang menghadapi satu
mat jang maha penting. Tidakkah kita mengetahui,
bagaimana telah diutarakan oleh ber-puluh² pem-
itjara, bahwa sebenarnya internationaalrecht, hukum
international, menggampangkan pekerdjaan kita?
untuk menjusun, mengadakan, mengakui satu ne-
gara jang merdeka, tidak diadakan sjarat jang neko²,
ng mendjelimet, tidak! Sjaratnja sekedar bumi,
rakjat, pemerintah jang teguh! Ini sudah tjukup
untuk internationaalrecht. Tjukup, saudara². Asal
ada buminja, ada rakjatnja, ada pemerintahnja,
kemudian diakui oleh salah satu negara jang lain,
ng merdeka, inilah jang sudah bernama: merdeka.
Tidak perduli rakjat dapat batja atau tidak, tidak
perduli rakjat hebat econominja atau tidak, tidak per-
duli rakjat bodoh atau pintar, asal menurut hukum
international mempunjai sjarat² suatu negara mer-
deka. jaitu ada rakjatnja, ada buminja dan ada peme-
intahnja, — sudahlah ia merdeka.

Djanganlah kita gentar, zwaarwichtig, lantas mau
menjlesaikan lebih dulu 1001 soal jang bukan²!
Sekali lagi saja bertanja: Mau merdeka apa tidak?
Mau merdeka apa tidak?

(Djawab hadlirin: mau!).

Saudara? Sesudah saja bitjarakan tentang hal
„merdeka”, maka sekarang saja bitjarakan tentang
hal d a s a r.

Paduka tuan Ketua jang mulia! Saja mengerti
apakah jang Paduka tuan Ketua kehendaki! Paduka
tuan Ketua minta d a s a r, minta p h i l o s o f
i s c h e g r o n d s l a g, atau, djikalau kita
boleh memakai perkataan jang muluk², Paduka tuan
Ketua jang mulia meminta suatu „weltanschauung”,
diatas mana kita mendirikan negara Indonesia itu.

Kita melihat dalam dunia ini, bahwa banjak ne-
geri² jang merdeka dan banjak diantara negeri² jang
merdeka itu berdiri diatas suatu „Weltanschauung”.
Hitler mendirikan Djermania diatas „national-
sozialistische Weltanschauung” — filsafat nasional-
sosialisme telah mendjadi dasar negara Djermania
jang didirikan oleh Adolf Hitler itu. Lenin mendiri-
kan negara Sovjet diatas satu „Weltanschauung”,
jaitu Marxistische Historisch-Materialistische Wel-
tanschauung. Nippon mendirikan negara Dai Nippon
diatas satu „Weltanschauung”, jaitu jang dinamakan
„Tennoo Koodoo Seishin”. Diatas „Tennoo Koodoo
Seishin” inilah negara Dai Nippon didirikan. Saudi
Arabia, Ibn Saud, mendirikan negara Arabia diatas
satu „Weltanschauung”, bahkan diatas satu dasar
agama, jaitu Islam. Demikian itulah jang diminta
oleh Paduka tuan Ketua jang mulia: Apakah „Wel-
tanschauung” kita, djikalau kita hendak mendirikan
Indonesia jang merdeka?

Tuan² sekalian, „Weltanschauung” ini sudah lama
harus kita bulatkan didalam hati kita dan didalam
pikiran kita, sebelum Indonesia Merdeka datang.
Idealis-idealisis diseluruh dunia bekerdja mati-matian
untuk mengadakan bermatjam-matjam „Weltan-
schauung” bekerdja mati-matian untuk me-„realiteit-
kan” „Weltanschauung” mereka itu. Maka oleh ka-
rena itu, sebenarnya tidak benar perkataan anggota
jang terhormat Abikoeno, bila beliau berkata, bah-
wa banjak sekali negara-negara merdeka didirikan
dengan isi seadanya s saja, menurut keadaan. Tidak!
Sebab misalnja, walaupun menurut perkataan John
Reed: „Sovjet-Rusia didirikan didalam 10 hari oleh
Lenin cs.” — John Reed, didalam kitabnja: „Ten
days that shook the world”, „Sepuluh hari jang
menggontjangkan dunia” —, walaupun Lenin men-
dirikan Sovjet-Rusia didalam 10 hari, tetapi „W e l-
t a n s c h a u n g”nja telah tersedia berpuluh-puluh
tahun. Terlebih dulu telah tersedia „Weltan-
schauung”nja, dan didalam 10 hari itu hanya sekedar
direbut kekuasaan, dan ditempatkan negara baru itu
diatas „Weltanschauung” jang sudah ada. Dari 1895
„Weltanschauung” itu telah disusun. Bahkan dalam
revolutie 1905, Weltanschauung itu „ditjobakan”,
di „generale-repetitie”kan.

Lenin didalam revolusi tahun 1905 telah mengerjakan apa yang dikatakan oleh beliau sendiri „generale-repetitie” dari pada revolusi tahun 1917. Sudah lama sebelum 1917 „Weltanschauung” itu disediakan, bahkan diichtiar-ichtiarkan. Kemudian, hanya dalam 10 hari, sebagai dikatakan oleh John Reed, hanya dalam 10 hari itulah didirikan negara baru, direbut kekuasaan, ditaruhkan kekuasaan itu diatas „Weltanschauung” yang telah berpuluh-puluh tahun umurnja itu. Tidakkah pula Hitler demikian?

Didalam tahun 1933 Hitler menaiki singgasana kekuasaan, mendirikan negara Djermania diatas National-sozialistische Weltanschauung.

Tetapi kapankah Hitler mulai menjediakan dipunja „Weltanschauung itu? Bukan didalam tahun 1933, tetapi didalam tahun 1921 dan 1922 beliau telah bekerdja, kemudian mengichtiarkan pula, agar supaja Naziisme ini, „Weltanschauung” ini, dapat menjelma dengan dipunja „Munchener Putsch”, tetapi gagal. Didalam tahun 1933 barulah datang saatnja yang beliau dapat merebut kekuasaan, dan negara diletakkan oleh beliau diatas dasar „Weltanschauung” yang telah dipropagandakan ber-puluh² tahun itu.

Maka demikian pula, djika kita hendak mendirikan negara Indonesia Merdeka, Paduka tuan Ketua, timbullah pertanjaan: Apakah „Weltanschauung” kita, untuk mendirikan negara Indonesia Merdeka diatasnja? Apakah nasional-sosialisme? Apakah historisch-materialisme? Apakah San Min Chu I, sebagai dikatakan oleh doktor Sun Yat Sen? Didalam tahun 1912 Sun Yat Sen mendirikan negara Tiongkok merdeka, tetapi „Weltanschauung”nja telah dalam tahun 1885, kalau saja tidak salah, dipikirkan, dirantjangkan. Didalam buku „The three people’s principles” San Min Chu I, — Mintsu, Minchuan, Min Sheng, — nasionalisme, demokrasi, sosialisme, — telah digambarkan oleh doktor Sun Yat Sen Weltanschauung itu, tetapi baru dalam tahun 1912 beliau mendirikan negara baru diatas „Weltanschauung” San Min Chu I itu, yang telah disediakan terdahulu ber-puluh² tahun.

Kita hendak mendirikan negara Indonesia Merdeka diatas „Weltanschauung” apa? Nasional-sosialisme-kah? Marxismekah, San Min Chu I atau „Weltanschauung” apakah?

Saudara² sekalian, kita telah bersidang tiga hari lamanja, banjak pikiran telah dikemukakan, — matjam² — tetapi alangkah benarnja perkataan dr. Soekiman, perkataan Ki Bagoes Hadikoesoemo, bahwa kita harus mentjari persetudjuan, mentjari persetudjuan faham. Kita bersama-sama mentjari persatuan philosophische grondslag, mentjari satu „Weltanschauung” yang kita semua setudju. Saja katakan lagi setudju! Jang saudara Yamin setudju, jang Ki Bagoes setudju, jang Ki Hadjar setudju, jang saudara Sanoesi setudju, jang saudara Abikoeso setudju, jang saudara Lim Koen Hian setudju, pendeknja kita semua mentjari satu modus. Tuan Yamin, ini bukan compromis, tetapi kita ber-

sama² mentjari satu hal jang kita bersama-sama setudju. Apakah itu? Per-tama², saudara², saja bertanja: Apakah kita hendak mendirikan Indonesia Merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan? Mendirikan negara Indonesia Merdeka jang namanja sadja Indonesia Merdeka, tetapi sebenarnja hanya untuk mengagungkan satu orang untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan jang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan?

Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak! Baik saudara² jang bernama kaum kebangsaan jang disini, maupun saudara² jang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan negara jang demikian itulah kita punja tudjuan. Kita hendak mendirikan suatu negara „semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan baik golongan bangsawan, maupun golongan jang kaya, — tetapi „semua buat semua”. Inilah salah satu dasar pikiran jang nanti akan saja kupas lagi. Maka, jang selalu mendengar didalam saja punja djiwa, bukan sadja didalam beberapa hari didalam sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoo sakai ini, akan tetapi sedjak 1918, 25 tahun lebih ialah: Dasar pertama, jang baik didjadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan.

Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia.

Saja minta, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan saudara² Islam lain: maafkanlah saja memakai perkataan „kebangsaan” ini! Sajapun orang Islam. Tetapi saja minta kepada saudara², djanganlah saudara² salah faham djikalau saja katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti jang sempit, tetapi saja menghendaki satu nasionalisme, seperti jang saja katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari jang lalu. Satu Nationale Staat Indonesia bukan berarti satu jang sempit. Sebagai saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo katakan kemarin, maka tuan adalah orang bangsawan Indonesia, bapak tuanpun orang Indonesia, nenek tuanpun bangsa Indonesia, datuk-datuk tuan, nenek moyang tuanpun bangsa Indonesia. Diatas satu kebangsaan Indonesia, dalam arti jang dimaksud oleh saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo itulah, kita mendirikan negara Indonesia.

Satu Nationale Staat! Hal ini perlu diterangkan lebih dahulu, meski saja didalam rapat besar di Taman Raden Saleh sedikit-sedikit telah menerangkannja. Marilah saja uraikan lebih djelas dengan mengambil tempoh sedikit: Apakah jang dinamakan bangsa? Apakah sjaratnja bangsa?

Menurut Renan sjarat bangsa ialah „kehendak akan bersatu”. Perlu orang-orangnja merasa akan bersatu dan mau bersatu.

Ernest Renan menjebut sjarat bangsa: „le désir d’être ensemble”. jaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, maka jang mendjaja bangsa, jaitu satu gerombolan manusia jang mau bersatu, jang merasa dirinja bersatu.

Kalau kita lihat definisi orang lain, jaitu definisi Otto Bauer, didalam bukunya "De Nationalitätenfrage", disitu ditanjakan : "Was ist eine Nation?" dan djawabnja ialah : "Eine Nation ist eine aus Schicksalsgemeinschaft erwachsenen Charaktergemeinschaft". Inilah menurut Otto Bauer satu natie. (Bangsa adalah satu persatuan perangai jang timbul karena persatuan nasib).

Tetapi kemarinpun, tatkala, kalau tidak salah, Prof. Soepomo mensitir Ernest Renan, maka anggota jang terhormat Mr. Yamin berkata : „verouderd“, „sudah tua“. Memang tuan-tuan sekalian, definisi Ernest Renan sudah „verouderd“, sudah tua. Definisi Otto Bauer pun sudah tua. Sebab tatkala Ernest Renan mengadakan defenisinja itu, tatkala Otto Bauer mengadakan definisinja itu, tatkala itu belum timbul satu wetenschaap baru, satu ilmu baru, jang dinamakan Geopolitik.

Kemarin, kalau tidak salah, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo atau tuan Moenandar, mengatakan tentang „Persatuan antara orang dan tempat“. Persatuan antara orang dan tempat, tuan-tuan sekalian, persatuan antara manusia dan tempatnja!

Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakjat dari bumi jang ada dibawah kakinja. Ernest Renan dan Otto Bauer hanja sekedar melihat orangnja. Mereka hannja memikirkan „Gemeinschaft“nja dan perasaan orangnja, „l'ame et le desir“. Mereka hanja mengingat karakter, tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi, bumi jang didiami manusia itu. Apakah tempat itu? Tempat itu jaitu t a n a h - a i r. Tanah air itu adalah satu kesatuan. Allah s.w.t. membuat peta dunia, menjusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menundjukkan dimana „kesatuan-kesatuan“ disitu. Seorang anak ketjilpun, djikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menundjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditundjukkan satu kesatuan gerombolan pulau² diantara dua lautan jang besar, lautan Pasific dan lautan Hindia, dan diantara 2 benua, jaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak ketjil dapat mengatakan, bahwa pulau-pulau Djawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Ketjil, Maluku, dan lain-lain pulau ketjil diantaranya, adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap anak ketjil dapat melihat pada peta bumi, bahwa pulau-pulau Nippon jang membentang pada pinggir Timur benua Asia sebagai „golfbreker“ atau pengadang gelombang lautan Pacific adalah satu kesatuan.

Anak ketjilpun dapat melihat, bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh lautan Hindia jang luas dan gunung Himalaya. Seorang anak ketjil pula dapat mengatakan, bahwa kepulauan Inggris adalah satu kesatuan.

Griekenland atau Junani dapat ditundjukkan sebagai satu kesatuan pula. Itu ditaruhkan oleh Allah S.w.t. demikian rupa. Bukan Sparta sadja, bukan Athene sadja, bukan Macedonia sadja, tetapi Sparta plus Athene plus Macedonia plus daerah Junani

jang lain-lain, segenap kepulauan Junani, adalah satu kesatuan.

Maka manakah jang dinamakan tanah tumpah-darah kita, tanah-air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesia:alah tanah-air kita. Indonesia jang bulat, bukan Djawa sadja, bukan Sumatera sadja, atau Borneo sadja, atau Selebes sadja, atau Ambon sadja, atau Maluku sadja, tetapi segenap kepulauan jang ditundjuk oleh Allah s.w.t. mendjadi satu kesatuan antara dua benua dan dua samudra, itulah tanah-air kita!

Maka djikalau saja ingat perhubungan antara orang dan tempat, antara rakjat dan buminja, maka tidak tjukuplah definisi jang dikatakan oleh Ernest Renan dan Otto Bauer itu. Tidak tjukup le desir d'etre ensemble“, tidak tjukup definisi Otto Bauer „aus Schicksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft“ itu. Maaf saudara-saudara, saja mengambil tjontoh Minangkabau. Diantara bangsa Indonesia, jang paling ada „desir d'etre ensemble“, adalah rakjat Minangkabau, jang banjaknja kira-kira 2½ m:ljun. Rakjat ini merasa dirinja satu keluarga. Tetapi Minangkabau bukan satu kesatuan, melainkan hanja satu bahagian ketjil dari pada satu kesatuan! Penduduk Jogjapun adalah merasa „le desir d'etre ensemble“, tetapi Jogjapun hanja satu bahagian ketjil dari pada kesatuan. Di Djawa Barat rakjat Pasundan sangat merasakan „le desir d'etre ensemble“, tetapi Sundapun hanja satu bahagian ketjil dari pada satu kesatuan.

Pendek kata, bangsa Indonesia, Natie Indonesia, bukanlah sekedar satu golongan orang jang hidup dengan „le desir d'etre ensemble“ diatas daerah jang ketjil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Jogja, atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah s e l u r u h manusia-manusia jang, menurut geopolitik jang telah ditentukan oleh Allah s.w.t., tinggal dikesatuannja semua pulau-pulau Indonesia dari udjung Utara Sumatera sampai ke Irian.! S e l u r u h n j a l. karena antara manusia 70.000.000 ini sudah ada „le desir d'etre ensemble“, sudah terdjadi „Charaktergemeinschaft“! Natie Indonesia, bangsa Indonesia, ummat Indonesia djumlah orangnja adalah 700.000.000, tetapi 70.000.000 jang telah mendjadi s a t u, s a t u, sekali lagi s a t u!

Kesinilah kita semua harus menudju : mendirikan satu Nationale Staat, diatas kesatuan bumi Indonesia dari Udjung Sumatera sampai ke Irian. Saja yakin tidak ada satu golongan diantara tuan-tuan jang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan jang dinamakan „golongan kebangsaan“. Kesinilah kita harus menudju semuanja.

Saudara-saudara, djangan orang mengira, bahwa tiap-tiap negara-merdeka adalah satu nationale staat! Bukan Pruisen, bukan Beieren, bukan Saksen adalah nationale staat, tetapi seluruh Djermanilah satu nationale staat. Bukan bagian ketjil-ketjil, bukan Venetia, bukan Lombardia, tetapi seluruh Italialah, jaitu seluruh semenandjung di Laut Tengah, jang diutara dibatasi oleh pegunungan

Alpen, adalah nationale staat. Bukan Benggala, bukan Punjab, bukan Bihar dan Orissa, tetapi seluruh segi-tiga. Indialah nanti harus mendjadi nationale staat.

Demikian pula bukan semua negeri² ditanah-air kita yang merdeka didjaman dahulu, adalah nationale staat. Kita hanya 2 kali mengalami nationale staat, jaitu didjaman Sri Widjaja dan didjaman Madjapahit. Diluar dari itu kita tidak mengalami nationale staat. Saja berkata dengan penuh hormat kepada kita punja radja² dahulu, saja berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanjokrokoesoemo, bahwa Mataram, meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Padjadjaran, saja berkata, bahwa keradjaannya bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtajasa, saja berkata, bahwa keradjaannya di Banten, meskipun merdeka, bukan satu nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanoeddin di Sulawesi yang telah membentuk keradjaan Bugis, saja berkata, bahkan tanah Bugis yang merdeka itu bukan nationale staat.

Nationale staat hanya Indonesia s e l u r u h n j a, yang telah berdiri didjaman Sri Widjaja dan Madjapahit dan yang kini pula kita harus dirikan ber-sama². Karena itu, djikalau tuan² terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar Negara yang pertama: K e b a n g s a a n I n d o n e s i a. Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Djawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi k e b a n g s a a n I n d o n e s i a, yang ber-sama² mendjadi dasar satu nationale staat. Maaf, Tuan Lim Koen Hian, Tuan tidak mau akan kebangsaan? Didalam pidato Tuan, waktu ditanja sekali lagi oleh Paduka Tuan Fuku Kaityoo, Tuan mendjawab: „Saja tidak mau akan kebangsaan“.

Tuan Lim Koen Hian: Bukan begitu. Ada sambungannya lagi.

Tuan Soekarno: Kalau begitu, maaf, dan saja mengutjapkan terima kasih, karena tuan Liem Koen Hian pun menjeturjdji dasar kebangsaan. Saja tahu, banjak djuga orang² Tionghoa klasik yang tidak mau akan dasar kebangsaan, karena mereka memeluk faham kosmopolitisme, yang mengatakan tidak ada kebangsaan, tidak ada bangsa. Bangsa Tionghoa dahulu banjak yang kena penjakit kosmopolitisme, sehingga mereka berkata bahwa tidak ada bangsa Tionghoa, tidak ada bangsa Nippon, tidak ada bangsa India, tidak ada bangsa Arab, tetapi semuanya „menschheid“, „peri kemanusiaan“. Tetapi Dr. Sun Yat Sen bangkit, memberi pengadjaran kepada raktjat Tionghoa, bahwa ada kebangsaan Tionghoa! Saja mengaku, pada waktu saja berumur 16 tahun, duduk dibangku sekolah H.B.S. di Surabaya, saja dipengaruhi oleh seorang sosialis yang bernama A. Baars, yang memberi peladjaran kepada saja, — katanja: djangan berfaham kebangsaan, tetapi berfahamlah rasa kemanusiaan sedunia, djangan mempunyai rasa kebangsaan sedikitpun. Itu terdjadi pada

tahun 17. Tetapi pada tahun 1918, alhamdulillah, ada orang lain yang memperingatkan saja, — ialah Dr. Sun Yat Sen! Didalam tulisannya „San Min Chu I“ atau „The Three People's Principles“, saja mendapat peladjaran yang membongkar kosmopolitisme yang diadjaran oleh A. Baars itu. Dalam hati saja sedjak itu tertanamlah r a s a k e b a n g s a a n, oleh pengaruh „The Three People's Principles“ itu. Maka oleh karena itu, djikalau seluruh bangsa Tionghoa menganggap Dr. Sun Yat Sen sebagai pengandjurnja, jakinlah, bahwa Bung Karno djuga seorang Indonesia yang dengan perasaan hormat-sehormat²nja merasa berterima-kasih kepada Dr. Sun Yat Sen, — sampai masuk kelobang kubur.

Saudara². Tetapi tetapi memang prinsip kebangsaan ini ada bahajanja! Bahajanja ialah mungkin orang meruntjingkan nasionalisme mendjadi chauvinisme, sehingga berfaham „Indonesia uber Alles“. Inilah bahajanja! Kita tjinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu. Tetapi Tanah Air kita Indonesia hanya satu bahagian ketjil sadja dari pada dunia! Ingatlah akan hal ini!

Gandhi berkata: „Saja seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saja adalah peri kemanusiaan“. „My nationalism is humanity“.

Kebangsaan yang kita andjurkan bukan kebangsaan yang menjendiri, bukan chauvinisme, sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropah, yang mengatakan „Deutschland uber Alles“, tidak ada yang setinggi Djermania, yang katanja bangsanja minuljo, berambut djagung dan bermata biru „bangsa Asia“, yang dianggapnja tertinggi diatas dunia, sedang bangsa lain-lain tidak ada harganja. Djangan kita berdiri diatas azas demikian, Tuan-tuan, djangan berkata, bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulja, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menudju persatuan dunia persaudaraan dunia.

Kita bukan sadja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menudju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

Djusru inilah prinsip saja yang kedua. Inilah filosofisch principe yang nomor dua, yang saja usulkan kepada Tuan-tuan, yang boleh saja namakan „internasionalisme“. Tetapi djikalau saja katakan internasionalisme, bukanlah saja bermaksud kosmopolitisme, yang tidak mau adanya kebangsaan, yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika dan lain-lainnja.

Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar didalam buminja nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman-sarinja internasionalisme. Djadi, duhal ini, saudara², prinsip 1 dan prinsip 2, yang pertama-tama saja usulkan kepada tuan² sekalian, adalah bergandengan erat satu sama lain.

Kemudian, apakah dasar yang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusjawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu

golongan, walaupun golongan kaja. Tetapi kita mendirikan negara „semua buat semua”, „satu buat semua, semua buat satu”. S a j a j a k i n bahwa sjarat jang mutlak untuk kuatnja negara Indonesia ialah permusjawaratan, perwakilan.

Untuk pihak Islam, inilah tempat jang terbaik untuk memelihara agama. Kita, sajumpun, adalah orang Islam, — maaf beribu-ribu maaf, keislaman saja djauh belum sempurna, — tetapi kalau saudara² membuka saja punja dada, dan melihat saja punja hati, tuan² akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusjawaratan. Dengan tjara mufakat, kita perbaikan segala hal, djuga keselamatan agama, jaitu dengan djalan pembijtaraan atau permusjawaratan didalam Badan Perwakilan Rakjat.

Apa² jang belum memuaskan, kita bitjarakan didalam permusjawaratan. Badan perwakilan, inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan² Islam. Disinilah kita usulkan kepada pemimpin² rakjat, apa² jang kita rasa perlu bagi perbaikan. Djikalau memang kita rakjat Islam, marilah kita bekerdja sehebat-hebatnja, agar-supaja sebagian jang terbebas dari pada kursi² badan perwakilan Rakjat jang kita adakan, diduduki oleh utusan² Islam. Djikalau memang rakjat Indonesia rakjat jang bagian besar-nya rakjat Islam, dan djikalau memang Islam disini agama jang hidup ber-kobar² didalam kalangan rakjat, marilah kita pemimpin² menggerakkan segenap rakjat itu agar supaja mengerahkan sebarang mungkin utusan² Islam kedalam badan perwakilan ini. Baratnja badan perwakilan Rakjat 100 orang anggotanja, marilah kita bekerdja, bekerdja sekeras-kerasnja, agar supaja 60,70,80,90 utusan jang duduk dalam perwakilan rakjat ini orang Islam, pemuka² Islam. Dengan sendirinja hukum² jang keluar dari badan perwakilan rakjat itu, hukum Islam pula. Malahan saja yakin, djikalau hal jang demikian itu djata terdjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar² h i d u p didalam djiwa rakjat sehingga 60%, 70%, 80%, 90% utusan adalah orang Islam, pemuka² Islam, ulama² Islam. Maka saja berkata baru djikalau demikian, baru djikalau demikian, h i d u p l a h Islam Indonesia, dan badan Islam jang hanja diatas bibir sadja. Kita berata, 90% dari pada kita beragama Islam, tetapi hatilah didalam sidang ini berapa persen jang memberikan suaranya kepada Islam? Maaf seribu maaf, saja tjanja hal itu! Bagi saja hal itu adalah satu bukti, bahwa Islam belum hidup sehidup-hidupnja didalam kalangan rakjat. Oleh karena itu, saja minta kepada saudara² sekalian, baik jang bukan Islam, maupun terutama jang Islam, setudjuilah prinsip nomor 3 ini, itu prinsip permusjawaratan, perwakilan. Dalam perwakilan nanti ada perdjjoangan sehebat-hebatnja. Tidak ada satu staat jang hidup betul² hidup, djikalau didalam badan perwakilannja tidak se-akan² bergok mendidih kawah Tjandradimuka kalau tidak ada perdjjoangan faham didalamnya. Baik didalam staat

Islam, maupun didalam staat Kristen, perdjjoangan selamanya ada. Terimalah prinsip nomor 3, prinsip mufakat, prinsip perwakilan rakjat! Didalam perwakilan rakjat saudara² Islam dan saudara² Kristen bekerdjalah se-hebat²nja. Kalau misalnja orang Kristen ingin bahwa tiap² letter didalam peraturan² negara Indonesia harus menurut Indjil, bekerdja mati²an agar supaja sebagian besar dari pada utusan² jang masuk badan perwakilan Indonesia ialah orang Kristen. Itu adil, — fair play! Tidak ada satu negara boleh dikatakan negara hidup, kalau tidak ada perdjjoangan didalamnya. Djangan kira di Turki tidak ada perdjjoangan. Djangan kira dalam negara Nippon tidak ada pergeseran pikiran. Allah Subahanahuwa Ta'ala memberi pikiran kepada kita, agar supaja dalam pergaulan kita se-hari², kita selalu bergosok, se-akan² menumbuk membersihkan gabah, supaja keluar dari padanja beras, dan beras itu akan mendjadi nasi Indonesia jang se-baik²nja. Terimalah saudara², prinsip nomor 3, jaitu prinsip permusjawaratan!

Prinsip nomor 4 sekarang saja usulkan. Saja didalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, jaitu prinsip kesedjahteraan, prinsip: tidak ada kemiskinan didalam Indonesia Merdeka. Saja katakan tadi: prinsipnja San Min Chu I ialah Mintsu, Min Chuan, Min Sheng; nationalism, democracy, socialism. Maka prinsip kita harus: Apakah kita mau Indonesia Merdeka, jang kaum kapitalnja meredjalela, ataukah jang semua rakjatnja sedjahtera, jang semua orang tjukup makan, tjukup pakaian, hidup dalam kesedjahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi jang tjukup memberi sandang-pangan kepadanya? Mana jang kita pilih, saudara²? Djangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakjat sudah ada, kita dengan sendirinja sudah mentjapai kesedjahteraan ini. Kita sudah lihat, di-negara' Eropa adalah Badan Perwakilan adalah parlementaire democratie. Tetapi tidakkah di Eropah djustru kaum kapitalis meradja-lela?

Di Amerika ada suatu badan perwakilan rakjat, dan tidakkah di Amerika kaum Kapitalis meradja-lela? Tidakkah diseluruh benua Barat kaum Kapitalis meradja-lela? Pada hal ada badan perwakilan rakjat! Tak lain tak bukan sebabnja, ialah oleh karena badan² perwakilan rakjat jang diadakan disana itu, sekedar menurut resepnja Fransche Revolutie. Tak lain tak bukan adalah jang dinamakan democratie disana itu hanjalah p o l i t i e k e democratie sadja; se-mata² tidak ada sociale rechtvaardigheid, — tak ada k e a d i l a n s o s i a l tidak ada e k o n o m i s c h e democratie sama sekali. Saudara², saja ingat akan kalimat seorang pemimpin Perantj's, Jean Jaures, jang menggambarkan politieke democratie. „Didalam Parlementaire Democratie, kata Jean Jaures, didalam Parlementaire Democratie, tiap² orang mempunyai hak sama. Hak p o l i t i e k jang sama, tiap² orang boleh memilih, tiap² orang boleh masuk didalam parlement. Tetapi adakah Sociale rechtvaardigheid, adakah kenjataan kesedjahteraan dikalangan rakjat?” Maka

oleh karena itu Jean Jaures berkata lagi :

„Wakil kaum buruh jang mempunyai hak politik itu, didalam Parlemen dapat menjatuhkan minister. Ia seperti Radja! Tetapi didalam diapunja tempat bekerdja, didalam paberik, — sekarang ia menjatuhkan minister, besok dia dapat dilempar keluar kedjalan raja, dibikin werkloos, tidak dapat makan suatu apa”.

Adakah keadaan jang demikian ini jang kita kehendaki?

Saudara², saja usulkan : Kalau kita mentjari demokrasi hendaknja bukan demokrasi Barat, tetapi permusjawaratan jang memberi hidup, yakni politik-ekonomishe democratie jang mampu mendatangkan kesedjahteraan sosial! Rakjat Indonesia sudah lama bitjara tentang hal ini. Apakah jang dimaksud dengan Ratu-Adil? Jang dimaksud dengan faham Ratu-Adil, ialah sociale rechtvaardigheid. Rakjat ingin sedjahtera. Rakjat jang tadi nja merasa dirinja kurang makan kurang pakaian, mentjiptakan dunia baru jang didalamnja ada keadilan, dibawah pimpinan Ratu-Adil. Maka oleh karena itu, djikalau kita memang betul² mengerti, mengingat, mentjinta rakjat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, jaitu bukan sadja persamaan politik, saudara², tetapi pun diatas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinja kesedjahteraan bersama jang sebaik-baiknya.

Saudara², badan permusjawaratan jang kita akan buat, hendaknja bukan badan permusjawaratan politieke democratie sadja, tetapi badan jang bersama dengan masjarakat dapat mewujudkan dua prinsip : politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid.

Kita akan bitjarakan hal² ini ber-sama², saudara², didalam badan permusjawaratan. Saja ulangi lagi, segala hal akan kita selesaikan, segala hal! Djuga didalam urusan kepala negara, saja terus terang, saja tidak akan memilih monarchie. Apa sebab? Oleh karena monarchie „vooronder stelt erfrelijkheid”, — turun-temurun. Saja seorang Islam, saja demokrat karena saja orang Islam, saja menghendaki mufakat, maka saja minta supaya tiap² kepala negara pun dipilih. Tidakkah agama Islam mengatakan bahwa kepala² negara, baik kalif, maupun Amirul mu'minin, harus dipilih oleh rakjat? Tiap² kali kita mengadakan kepala negara, kita pilih. Djikalau pada suatu hari Ki Bagoes Hadikoesoemo misalnja, mendjadi kepada negara Indonesia, dan mangkat, meninggal dunia, djangan anaknja Ki Bagoes Hadikoesoemo dengan sendirinja, dengan otomatis mendjadi pengganti Ki Hadikoesoemo. Maka oleh karena itu saja tidak mufakat kepada prinsip monarchie itu.

Saudara², apakah prinsip kelima? Saja telah mengemukakan 4 prinsip :

1. Kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme, — atau peri-kemanusiaan.
3. Mufakat, — atau demokrasi.
4. Kesedjahteraan sosial.

Prinsip jang kelima hendaknja :

Menjusun Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Jang Maha Esa.

Prinsip Ketuhanan! Bukan sadja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing² orang Indonesia hendaknja bertuhan Tuhanja sendiri. Jang Kristen menjembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, jang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w., orang Buddha mendjalankan ibadatnya menurut kitab² jang ada padanja. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknja negara Indonesia ialah negara jang tiap-tiap orangnja dapat menjembah Tuhanja dengan tjara jang leluasa. Segenap rakjat hendaknja ber-Tuhan setjara kebudajaan, yakni dengan tiada „egoisme-agama”. Dan hendaknja Negara Indonesia satu Negara jang bertuhan!

Marilah kita amalkan, djalankan agama, baik Islam, maupun Kristen dengan tjara jang berkeadilan. Apakah tjara jang berkeadilan itu? Ialah hormat-menghormat satu sama lain. Nabi Muhammad s.a.w. telah memberi bukti jang tjukup tentang verdraagzaamheid, tentang menghormati agama² lain. Nabi Isa pun telah menundjukkan verdraagzaamheid itu. Marilah kita didalam Indonesia Merdeka jang kita susun ini, sesuai dengan itu, menjatakan : bahwa prinsip kelima dari pada Negara kita, ialah Ketuhanan jang Berkebudajaan. Ketuhanan jang berbudi pekerti jang luhur, Ketuhanan jang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raja, djikalau saudara² menjetudjui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan Jang Maha Esa!

Disinilah, dalam pangkuan azas jang kelima inilah, saudara², segenap agama jang ada di Indonesia sekarang ini, akan mendapat tempat jang sebaik-baiknya. Dan Negara kita akan bertuhan pula!

Ingatlah, prinsip ketiga, permufakatan, perwakilan, disitulah tempatnja kita mempropagandakan idee kita masing² dengan tjara jang tidak onverdraagzaam, jaitu dengan tjara jang berkebudajaan!

Saudara²! „Dasar² Negara” telah saja usulkan Lima bilangannja. Inikah Pantja Dharma? Bukan! Nama Pantja Dharma tidak tepat disini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membitjarakan dasar. Saja senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima djumlahnja. Djaitu kita lima setangan. Kita mempunyai Pantja Inderia. Apa lagi jang lima bilangannja? (Seorang jang hadlir : Pendawa lima). Pendawa-pun lima orangnja. Sekarang banjakknja prinsip : kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesedjahteraan dan ketuhanan lima pula bilangannja.

Namanja bukan Pantja Dharma, tetapi — saja namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa — namanja ialah Pantja Sila. Sila artinja azas atau dasar, dan diatas ke lima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi.

Atau, barangkali ada saudara² jang tidak suka akan bilangan lima itu? Saja boleh peras, sehingga tinggal 3 sadja. Saudara² tanja kepada saja, apakah „perasan“ jang tiga itu? Ber-puluh² tahun sudah saja pikirkan dia, ialah dasar²nja Indonesia Merdeka, Weltanschauung kita. Dua dasar jang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan pri-kemanusiaan, saja peras mendjadi satu: itulah jang dahulu saja namakan *socio-nationalisme*.

Dan Demokrasi jang bukan demokrasi Barat, tetapi *politiek-economische democratie*, jaitu *politieke democratie* dengan *sociale rechtvaardigheid*, demokrasi dengan kesedjahteraan, saja peraskan pula mendjadi satu. Inilah jang dulu saja namakan *socio-democratie*.

Tinggal lagi ketuhanan jang menghormati satu sama lain.

Djadi jang asalnja lima itu telah mendjadi tiga: *socio-nationalisme*, *socio democratie* dan ketuhanan. Kalau Tuan senang kepada simbolik tiga, ambillah jang tiga ini. Tetapi barangkali tidak semua Tuan² senang kepada trisila ini, dan minta satu, satu dasar sadja? Baiklah saja djadikan satu, saja kumpulkan lagi mendjadi satu. Apakah jang satu itu?

Sebagai tadi telah saja katakan: kita mendirikan negara Indonesia jang kita semua harus mendukungnja. Semua bu at semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito jang kaja buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia, — semua bu at semua! Djikalau saja peras jang lima mendjadi tiga, dan jang tiga mendjadi satu, maka dapatlah saja satu perkataan Indonesia jang tulen, jaitu perkataan „Gotong-rojong“. Negara Indonesia jang kita dirikan haruslah negara gotong-rojong! Alangkah hebatnja Negara Gotong Rojong.

„Gotong Rojong“ adalah faham jang dinamis, lebih dinamis dari „kekeluargaan“, saudara²! Kekeuargaan adalah satu faham jang statis, tetapi gotong-rojong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerdjaan, jang dinamakan anggota jang menghormat Soekardjo satu karjo, satu gawe. Marilah kita menjelesaikan karjo, gawe, pekerdjaan, amal ini, bersama-sama! Gotong-rojong adalah pembanting-tulang bersama, pemerasan-keringat bersama, perdjongan bantu-binantu bersama. Semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis-bantul-baris buat kepentingan bersama! Itulah Gotong Rojong!

Prinsip Gotong Rojong diantara jang kaja dan jang tidak kaja, antara jang Islam dan jang Kristen, antara jang bukan Indonesia tulen dengan peranakan jang mendjadi bangsa Indonesia. Inilah saudara², jang saja usulkan kepada saudara².

Pantjasila mendjadi Trisila, Trisila mendjadi kasila. Tetapi terserah kepada Tuan², mana jang Tuan² pilih; trisila, ekasila ataukah pantjasila?

Isinja telah saja katakan kepada saudara² semuanya. Prinsip² seperti jang saja usulkan kepada saudara² ini, adalah prinsip untuk Indonesia Merdeka jang abadi. Puluhan tahun dadaku telah menggelora dengan prinsip² itu. Tetapi djangan lupa, kita hidup didalam masa peperangan, saudara². Didalam masa peperangan itulah kita mendirikan negara Indonesia, — didalam gunturnja peperangan! Bahkan saja mengutjap sjukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita mendirikan negara Indonesia bukan didalam sinarnja bulan purnama, tetapi dibawah palu godam peperangan dan didalam api peperangan. Timbullah Indonesia Merdeka; Indonesia jang gemblengan, Indonesia Merdeka jang digembleng dalam api peperangan, dan Indonesia Merdeka jang demikian itu adalah negara Indonesia jang kuat, bukan negara Indonesia jang lambat laun mendjadi bubur. Karena itulah saja mengutjap sjukur kepada Allah s.w.t.

Berhubung dengan itu, sebagai jang diusulkan oleh beberapa pembijtara² tadi, barangkali perlu diadakan *noodmaatregel*, peraturan jang bersifat sementara. Tetapi dasarnja isinja, Indonesia Merdeka jang kekal abadi menurut pendapat saja, haruslah Pantja Sila. Sebagai dikatakan tadi, saudara², itulah harus Weltanschauung kita. Entah saudara² mufakatinja atau tidak, tetapi saja berdjoang sedjak tahun 1918 sampai 1945 sekarang ini untuk Weltanschauung itu. Untuk membentuk nasionalistis Indonesia, untuk kebangsaan Indonesia; untuk kebangsaan Indonesia jang hidup didalam peri-kemanusiaan; untuk permufakatan; untuk *sociale rechtvaardigheid*; untuk ke-Tuhanan. Pantja Sila, itulah jang berkobar² didalam dada saja sedjak berpuluh tahun. Tetapi, saudara² diterima atau tidak, terserah kepada saudara².

Tetapi saja sendiri mengerti seinsjaf²nja, bahwa tidak ada satu Weltanschauung dapat mendjelma dengan sendirinja, mendjadi realiteit dengan sendirinja. Tidak ada satu Weltanschauung dapat mendjadi Kenjataan, mendjadi realiteit, djika tidak dengan perdjongan!

Djanganpun Weltanschauung jang diadakan oleh manusia, djanganpun jang diadakan oleh Hitler, oleh Stalin, oleh Lenin, oleh Sun Yat Sen!

„De Mensch“, — manusia! —, harus perdjongan itu. Zonder perdjongan itu tidaklah ia akan mendjadi realiteit! Leninisme tidak bisa mendjadi realiteit zonder perdjongan seluruh rakjat Rusia, San Min Chu I tidak dapat mendjadi kenjataan zonder perdjongan bangsa Tionghoa, saudara²! Tidak! bahkan saja berkata lebih lagi dari itu: zonder perdjongan manusia, tidak ada satu hal agama, tidak ada satu tjita² agama, jang dapat mendjadi realiteit. Djanganpun buatan manusia, sedangkan perintah Tuhan jang tertulis didalam kitab Qur'an, *zwart op wit* (tertulis diatas kertas), tidak dapat mendjelma mendjadi realiteit zonder perdjongan manusia jang dinamakan umat Islam. Begitu pula perkataan² jang tertulis didalam kitab Indjil, tjita² jang

(Bersambung ke halm. 16).

KEPUTUSAN AMANAT²/PIDATO² PRESIDEN/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI „GESURI”, „TAVIP”, „THE FIFTH FREEDOM IS OUR WEAPON” DAN „THE ERA OF CONFRONTATION” SEBAGAI PEDOMAN² PELAKSANAAN MANIPOL BAIK UNTUK BIDANG DALAM NEGERI MAUPUN BIDANG LUAR NEGERI
(Ketetapan M.P.R.S. No. VII/65)

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA

Setelah Membahas :

1. Amanat Presiden/Pemimpin Besar Revolusi „Genta Suara Revolusi Indonesia” (GESURI) jang diutjapkan pada tanggal 17 Agustus 1963;
2. Amanat Presiden/Pemimpin Besar Revolusi „Tahun Vivere Pericoloso” (TAVIP) jang diutjapkan pada tanggal 17 Agustus 1964;
3. Pidato Presiden/Pemimpin Besar Revolusi „The Fifth Freedom is our Weapon” jang diutjapkan di depan musjawarah para Menteri Negara² Afrika-Asia pada tanggal 10 April 1964 sebagai pendahuluan daripada Konperensi Afrika-Asia ke-II;
4. Pidato Presiden/Pemimpin Besar Revolusi „The Era of Confrontation” jang diutjapkan di KTT non-blok ke-II di Kairo pada tanggal 6 Oktober 1964;

Menimbang :

1. bahwa Amanat-amanat/Pidato-pidato tersebut dalam rangka mensukseskan Revolusi Indonesia tidak dapat dipisahkan daripada Haluan Negara dan Haluan Pembangunan jang pada hakekatnja djuga merupakan pedoman pelaksanaan daripada Manifesto Politik Republik Indonesia;
2. bahwa perlu menetapkan Amanat-amanat/Pidato diatas, djuga sebagai pedoman pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia;
3. meskipun pada prinsipnja hanja pidato-pidato Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS jang diutjapkan dimuka forum Konferensi² internasional jang bertingkat kenegaraan jang didjadikan pedoman pelaksanaan atau landasan-kerdja daripada Manipol/Usdek, namun demikian tidaklah berarti mengurangi arti pentingnja pidato² Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS jang diutjapkan dimuka forum Konferensi² solidaritas A.A. seperti : DESRAA, KIAA, d.l.l.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPRS No. I dan II/MPRS/1960;
3. Ketetapan MPRS No. III dan IV/MPRS/1963;
4. Amanat Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dalam sidang Muppenas tanggal 17 Maret 1965;

Mendengar :

Musjawarah MPRS dalam rapat MPRS tanggal 16 April 1965.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Ketetapan tentang pedoman-pedoman pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai berikut :

Pasal 1.

Amanat-amanat/Pidato-pidato Presiden/Pemimpin Besar Revolusi „GESURI” „TAVIP” „THE FIFTH FREEDOM IS OUR WEAPON” dan „THE ERA OF CONFRONTATION” adalah djuga sebagai pedoman pedoman pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia baik untuk bidang dalam negeri maupun bidang luar negeri.

Pasal 2.

Menugaskan dengan kekuasaan penuh kepada Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS untuk melaksanakan Ketetapan ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 April 1965.

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT
SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA
Ketua/Wakil Perdana Menteri III,
(Dr. Chairul Saleh)

Wakil Ketua/Menko.
(Ali Sastroamidjojo S.H.)
Wakil Ketua/Menko.
(D.N. Aidit)

Wakil Ketua/Menko.
(K.H. Idham Chalid)
Wakil Ketua/Menko.
(Maj. Djen. Wilujo Puspojudjo)

PERINSIP-PERINSIP MUSJAWARAH UNTUK MUFAKAT DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN SEBAGAI PEDOMAN BAGI LEMBAGA² PERMUSJAWARATAN/PERWAKILAN

KETETAPAN M.P.R.S. No. VIII/65

Dalam rapat Paripurna ke 2 tgl. 16 April 1965 sidang ke-III di Bandung.

B A B I.

SETELAH MEMBAHAS :

Usul Pimpinan MPRS tentang rentjana Ketetapan MPRS mengenai PRINSIP² MUSJAWARAH UNTUK MUFAKAT DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN SEBAGAI PEDOMAN BAGI LEMBAGA² PERMUSJAWARATAN/PERWAKILAN.

MENIMBANG :

1. Bahwa sudah tiba waktunya merumuskan prinsip² Musjawarah untuk Mufakat yang merupakan inti Demokrasi Terpimpin sebagai pedoman untuk setiap lembaga Permusjawaratan/Perwakilan;
2. Bahwa Musjawarah untuk Mufakat yang telah diadakan kembali harus dikembangkan dan disempurnakan pelaksanaannya dalam ketatanegaraan Indonesia untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat dan Tujuan Revolusi Nasional Indonesia, mewujudkan Masyarakat adil dan makmur, Masyarakat Sosialis Indonesia berdasarkan Pantja Sila;
3. Bahwa pelaksanaan Musjawarah untuk Mufakat merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam semua tahap Revolusi Indonesia terutama sekali dalam menghadapi tantangan² Revolusi Nasional yang belum selesai dan untuk mentjegah timbulnja kembali unsur² Demokrasi Liberal;
4. Bahwa prinsip Musjawarah Untuk Mufakat telah menjadi pegangan pokok bagi kehidupan partai² politik, golongan kerja dan lain² unsur masyarakat dalam penggalangan persatuan nasional progresif revolusioner berporoskan Nasionalisme.

MENINGGAT :

1. Dasar Negara Pantja Sila;
2. Undang² Dasar R.I. 1945;
3. Dekrit Presiden R.I. tgl. 5 Djuli 1959;
4. Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960, No. II/MPRS/1960, No. III/MPRS/1963, No. IV/MPRS/1963 dan No.
5. Amanat², konsepsi² dan Pidato² Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno;
6. Deklarasi Bogor tgl. 12 Desember 1964.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan Ketetapan tentang Prinsip² Musjawarah untuk Mufakat dalam Demokrasi Terpimpin sebagai pedoman bagi Lembaga² Permusjawaratan/Perwakilan.

PENDAHULUAN

Berkat Kemerdekaan yang diproklamkan pada tgl. 17 Agustus 1945 sebagai hasil kemenangan rakyat Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Bangsa Indonesia dengan bebas dapat menggali kepribadiannya. Ialah menggali kembali tjiri² khas pandangan hidup rakyat Indonesia tentang tata tjara dalam mengatur dan memimpin segala segi kehidupannya selama perdjalanannya masyarakat Indonesia sedjak ber-abad² yakni azas Demokrasi Indonesia, Demokrasi Gotong Royong, yang kemudian dikenal dengan nama Demokrasi Terpimpin, yaitu Kerakjatan yang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam Permusjawaratan/Perwakilan.

Gagasan Demokrasi Terpimpin sesungguhnya sudah mulai ditjetuskan pada djaman Pergerakan Kemerdekaan Nasional dengan sebutan "Democratie met Leiderschap" dan "Sosio Demokrasi".

Demokrasi Terpimpin adalah asli Demokrasi Indonesia, demokrasi berdasarkan Pantja Sila.

Demokrasi Terpimpin yang garis² besarnya telah didjalin dan tersusun dalam Undang² Dasar Republik Indonesia 1945 adalah perwujudan Kerakjatan yang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam Permusjawaratan/Perwakilan.

Akan tetapi akibat pendjadjahan Belanda dan pengaruh² Demokrasi liberal serta feodalisme dan fasisme selama pendudukan Djepang, maka selama itu, dan bahkan pada permulaan masa² Kemerdekaan, walaupun sistim Demokrasi Terpimpin telah digariskan dalam Undang² Dasar Republik Indonesia 1945, tetapi kabur dan lumpuhlah sistim Demokrasi Terpimpin sampai pada saat lahirnja Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang 5 Djuli 1959.

Alhamdulillah, berkat kebidjaksanaan, kewibawaan dan ketangkasan pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno yang pada tgl. 5 Djuli 1959 mengumumkan Dekrit Kembali ke Undang-undang Dasar 1945, diberkahi pula dengan lahirnja Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959, maka tegaklah kembali Sistim Demokrasi Terpimpin dengan intinja Musjawarah untuk Mufakat yang dilaksanakan setjara sadar.

Maka perlulah sistim dan keharusan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin itu selanjutnja dikembangkan dan disempurnakan dalam ketatanegaraan Indonesia, untuk menudju tertjapainja masyarakat adil dan makmur, masyarakat Sosialis Indonesia berdasarkan Pantja Sila, terutama sekali dalam menghadapi tantangan² Revolusi Indonesia tahap demi tahap.

Atas dasar² pemikiran tsb. diatas jang bersumber kepada Undang² Dasar Republik Indonesia 1945. Amanat², Konsepsi² dan Pidato² Presiden/ Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dan Ketetapan² MPRS, maka disusunlah ketentuan² mengenai pengertian dan Musjawarah untuk Mufakat.

B A B II.

DEMOKRASI TERPIMPIN

§ 1. PENGERTIAN DASAR

1. Demokrasi Terpimpin adalah kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah kebidaksanaan dalam Permusjawaratan/Perwakilan jang berintikan Musjawarah untuk Mufakat setjara gotong-rojong diantara semua kekuatan Nasional jang progresif revolusioner berporoskan Nasakom.
2. Demokrasi Terpimpin merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia, jaitu tata-tjara dalam mengatur dan memimpin segala segi kehidupan politik, ekonomi dan sosial rakjat dan Negara Indonesia, dengan penuh rasa tanggung-djawab akan kelantjaran djalannja revolusi.
3. Demokrasi Terpimpin adalah alat mengemban Amanat Penderitaan Rakjat dan tudjuan Revolusi Nasional Indonesia, mewujudkan masjarakat adil dan makmur, Masjarakat Sosialis Indonesia berdasarkan Pantja Sila, masjarakat tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia.

§ 2. A Z A S.

1. Demokrasi Terpimpin mempunjai dua unsur, jaitu Demokrasi dan Terpimpin jang ke-dua²nja bergandengan mutlak satu sama lain, dua unsur "loro-loroning atunggal".
2. Demokrasi Terpimpin mendjamin kebebasan berfikir dan berbitjara mengemukakan pendapat dalam setiap permusjawaratan, dalam batas² keselamatan Negara. kepentingan Rakjat banjak, kepribadian Bangsa, kesusilaan dan pertanggung-djawab kepada Tuhan.

§ 3. T U D J U A N.

1. Demokrasi Terpimpin bertudjuan melaksanakan Haluan Negara Manipol/Usdek dan Dekon untuk mentjapai masjarakat adil dan makmur, masjarakat sosialis Indonesia berdasarkan Pantja Sila, jang penuh dengan kebahagiaan materiil dan spirituil sesuai dengan tjita² Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
2. Demokrasi Terpimpin ditudjukan pula untuk melindungi dan menambahkan hak² bagi rakjat, dan menghapuskan hak² kaum imperialis, kaum feodalis serta kaki-ta-

ngan² mereka. kaum kontra revolusioner. kaum anti progresif dan kaum penghisap Rakjat.

§ 4. F U N G S I.

1. Demokrasi Terpimpin adalah alat Rakjat untuk mentjapai tudjuan Rakjat jang telah dikorban oleh Rakjat ber-puluh² tahun, jaitu Negara kuat, Masjarakat Adil Makmur.
2. Demokrasi Terpimpin pada hakekatnj adalah Demokrasi Penjelenggaraan atau Demokrasi Karya (werkdemocratie).
3. Demokrasi Terpimpin merupakan alat untuk melaksanakan Konsepsi² Bung Karno sebagai penjambung lidah Rakjat termasuk konsepsi jang ditjetuskan pada tgl. 21 Pebruari 1957.

§ 5. TJIRI-TJIRI CHAS.

1. Demokrasi Terpimpin bertentangan dengan demokrasi liberal, dan bukan diktatur, tetapi adalah Demokrasi Gotong-rojong dari semua jang mendukung Revolusi Indonesia menentang kapitalisme, imperialisme, feodalisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme.
2. Demokrasi Terpimpin bukan medan pertempuran antara oponen² satu sama lain, medan hantam²an antara antogonisme, medan untuk mentjari kemenangan satu golongan atas golongan jang lain, medan untuk merebut kekuasaan oleh satu golongan terhadap jang lain.
3. Demokrasi Terpimpin mentjari sintesis, mentjari akumulasi pikiran dan tenaga untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat.
4. Demokrasi Terpimpin melarang propaganda anti Nasionalisme, anti Agama, anti Komunisme, tetapi sebaliknya menghendaki konsultasi sesama aliran progresif revolusioner.

B A B III.

PRINSIP² MUSJAWARAH UNTUK MUFAKAT

§ 6. PENGERTIAN DASAR.

Musjawarah untuk Mufakat sebagai in Demokrasi Terpimpin, adalah tata-tjara kepribadian Indonesia untuk memetjahkan setiap persoalan kehidupan Rakjat dan Negara, mendapatkan kebulatan dan mufakat dalam permusjawaratan/perwakilan setjara gotong-rojong jang dipimpin oleh hikmah kebidaksanaan untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat, tudjuan Revolusi Nasional Indonesia, mewujudkan Masjarakat Adil dan Makmur Masjarakat Sosialis Indonesia berdasarkan Pantja Sila, masjarakat tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia.

7. AZAS MUSJAWARAH UNTUK MUFAKAT

1. Musjawarah dilaksanakan berdasarkan gotong rojong dengan sikap saling memberi dan menerima dalam suasana kekeluargaan, toleransi, timbang-rasa dan tenggang-menenggang antara segenap peserta musjawarah.
2. Pangkal bertolak dalam tiap musjawarah adalah apriori persatuan dan bukan pertentangan antara para peserta.
3. Musjawarah dilaksanakan antara mereka yang dengan sungguh² menjetudjui Dasar Negara Pantja Sila, U.U.D. 1945, Haluan Negara Manipol serta Pedoman² pelaksanaannya dan tudjuan Revolusi Nasional Indonesia, dan yang sungguh² berhasrat men-sukseskan musjawarah.
4. Musjawarah untuk mufakat bersendikan pada kesadaran dan rasa tanggung-djawab dari pimpinan dan peserta untuk meng-hadiri Musjawarah, oleh sebab itu Musjawa-rah untuk Mufakat pada dasarnya tidak mengenal korum, tetapi mengenal ikut sertanja unsur² yang berkepentingan dan yang representatif untuk turut dalam mu-sjawarah.

8. PESERTA MUSJAWARAH.

1. Peserta² musjawarah dalam permusjawa-ratan/perwakilan terdiri dari golongan poli-tik, golongan karya dan lain² unsur² ma-sjarakat yang mentjerminkan semua ke-kuatan² nasional yang progresif revolu-sioner.
2. Setiap peserta musjawarah mendahulukan kepentingan Rakjat dan Negara diatas ke-pentingan golongan dan perorangan.
3. Setiap peserta musjawarah mempunyai hak dan kesempatan yang sama luas dan bebas mengemukakan pendapat dan me-lahirkan kritik dan otokritik yang bersifat membangun tanpa tekanan dari pihak ma-napun.

9. M U F A K A T.

1. Mufakat sebagai hasil kebulatan pendapat yang didapat dari setiap permusjawaratan/perwakilan dengan djalan gotong-rojong adalah buah pikiran bersama, bukan oleh perdebatan dan penjiasatan yang diachiri oleh pengaduan kekuatan dan perhitungan suara pro dan kontra, melainkan untuk menjari kebenaran dalam melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat.
2. Mufakat sebagai hasil musjawarah bermu-tu tinggi yang dapat dipertanggung-djawabkan dan tidak bertentangan dengan dasar Negara dan tudjuan Revolusi.
3. Mufakat sebagai hasil kebulatan pendapat diterima dan harus dilaksanakan dengan kesungguhan dan keichlasan hati.

§ 10. PIMPINAN MUSJAWARAH.

Pimpinan permusjawaratan/perwakilan merupakan satu kesatuan kolektif yang mentjerminkan golongan² peserta musjawa-rah, harus berdjiwa Pantja Sila dan revolusioner, berwatak adil, arif bidjak-sana dan berwibawa serta harus setia kepada Undang² Dasar Negara dan tu djuan Revolusi Indonesia.

B A B IV.

FENTRAPAN DAN PEDOMAN PELAKSANA-AN MUSJAWARAH UNTUK MUFAKAT.

§ 11. PENTRAPAN KEPADA LEMBAGA² PERMUSJAWARATAN/PERWA-KILAN.

1. Lembaga² Negara berdasarkan U.U.D. RI 1945;
 - a. Madjelis Permusjawaratan Rakjat;
 - b. Dewan Perwakilan Rakjat;
 - c. Kementerian Negara;
 - d. Dewan Pertimbangan Agung;
 - e. Pemerintah Daerah;
 - f. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. Mahkamah Agung dan
 - h. Lembaga² Negara berdasarkan peratu-ran perundang-undangan lainnja.
2. Lembaga² kemasjarakatan.

§ 12. PEDOMAN PELAKSANAAN.

1. Prinsip² Musjawarah untuk Mufakat se-bagaimana tertjantum dalam Bab III se-luruhnja berlaku bagi semua lembaga² ne-gara legislatif, eksekutif dan judikatif, baik dipusat maupun didaerah² dan lembaga² kemasjarakatan.
2. Dalam permusjawaratan lembaga² legisla-tif, pimpinan lembaga mempunyai wewe-nang untuk menentukan dalam menetapkan mufakat (keputusan), djika tidak tertjapai kebulatan pendapat.
3. Dalam permusjawaratan lembaga² ekseku-tif keputusan harus diambil setjara kolek-tif, dan pimpinan lembaga mempunyai wewenang untuk menentukan dalam me-netapkan mufakat (keputusan), djika tidak tertjapai kebulatan pendapat.
4. Dalam permusjawaratan lembaga² judika-tif keputusan harus diambil setjara kolek-tif, dan pimpinan lembaga mempunyai we-wenang untuk menentukan dalam mene-tapkan mufakat (keputusan), djika tidak tertjapai kebulatan pendapat.
5. Dalam permusjawaratan lembaga² kema-sjarakatan pimpinan dan peserta musjawa-rah mempunyai hak yang sama dalam me-netapkan mufakat.
6. Apabila didalam musjawarah seperti yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (5) pa-ragraf 12, terdapat perbedaan pendapat, maka pimpinan dan peserta musjawarah berkewadajiban menjelesaikannya dengan semangat persatuan, gotong rojong dan ke-

keluarga, serta menginsafi akan kedudukannya sebagai alat Revolusi jang sedang berdjung guna mengemban Amanat Penderitaan Rakjat.

7. Apabila didalam sesuatu permusjawaratan tidak didapat mufakat, maka musjawarah mengambil kebidjaksanaan dengan menempuh djalan :
- a. persoalan itu ditangguhkan pembittjaraannya;
 - b. persoalan itu diserahkan kepada pimpinan untuk mengambil kebidjaksanaan dengan memperhatikan pendapat² jang bertentangan;
 - c. persoalan itu ditiadakan.

§ 13. PERMUSJAWARATAN ANTAR-LEMBAGA-NEGARA.

Prinsip Musjawarah untuk Mufakat dalam permusjawaratan antar lembaga Negara selalu dilaksanakan dengan mengindahkan wewenang, kedudukan dan fungsi masing² pihak.

§ 14. PENGAMANAN PELAKSANAAN.

Pengamanan terhadap pelaksanaan ketentuan² dalam Ketetapan ini, bila tidak tjukup terdjamin oleh lembaga² permusjawaratan/perwakilan jang bersangkutan, diserahkan kepada kebidjaksanaan Presiden/Pemimpin Besar Revolusi.

B A B V.

KETENTUAN PENUTUP.

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 April 1965.

P I M P I N A N

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT
SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

Ketua/Wakil Perdana Menteri III
(Dr. Chairul Saleh)

Wakil Ketua/Menko
(Ali Sastroamidjojo S.H.)

Wakil Ketua/Menko
(K.H. Idham Chalid)

Wakil Ketua/Menko,
(D.N. Aidit)

Wakil Ketua/Menko
(Maj. Djen. Wilujo Puspojudo)

Lahirnja Pantja Sila

termasuk didalamnja tidak dapat mendjelma zonder perdjongan umat Kristen.

Maka dari itu, djikalau bangsa Indonesia ingin supaja Pantja Sila jang saja usulkan itu, mendjadi satu realiteit, yakni djikalau kita ingin hidup mendjadi satu bangsa, satu nationaliteit, jang merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia jang merdeka, jang penuh dengan peri kemanusiaan ingin hidup diatas dasar permusjawaratan, ingin hidup sempurna dengan sociale rechtvaardigheid, ingin hidup dengan sedjahtera dan aman, dengan ke-Tuhanan jang luas dan sempurna, — djanganlah lupa akan sjarat untuk menjelenggarakannya, ialah perdjongan, perdjongan, dan sekali lagi perdjongan. Djangan mengira bahwa dengan berdirinja negara Indonesia Merdeka itu perdjongan kita telah berachir. Tidak! Bahkan saja berkata : D i d a l a m Indonesia Merdeka itu perdjongan kita harus berdjalan t e r u s, hanja lain sifatnja dengan perdjongan sekarang, lain tjoraknya. Nanti kita, ber-sama², sebagai bangsa jang ber-satu padu, berdjong terus menjelenggarakan apa

jang kita tjita²kan didalam Pantja Sila. Dan terutam d.dalam zaman peperangan ini, jakinlah, insjallah tanamkanlah dalam kalbu saudara², bahwa Indonesia Merdeka tidak dapat datang djika bangsa Indonesia tidak berani mengambil risiko, — tidak berani terdjun menjelami mutiara didalam samudera jang sedalam-dalamnja. Djikalau bangsa Indonesia tidak ber-satu dan tidak menekad-mati-matian untuk menjapai merdeka, tidaklah kemerdekaan Indonesia akan mendjadi milik bangsa Indonesia buat selamanya, sampai keachir djaman! Kemerdekaan hanjalah diperdapat dan dimiliki oleh bangsa, jang djiwanja berkobar² dengan tekad „Merdeka”, — „merdeka atau mati”!

Saudara²! Demikianlah saja punja djawab atas pertanyaan Paduka Tuan Ketua. Saja minta maaf bahwa pidato saja mendjadi pandjang lebar, dan sudah meminta tempo jang sedikit lama, dan saja djuga minta maaf, karena saja telah mengadakan kritik terhadap tjatatan Zimukyokutyoo jang saja anggap „verschrikkelijk zwaarwichtig itu. Terima kasih!

Masalah Perentjanaan*)

A. Pengertian Planning.

Arti dari Planning dengan djelas dilihat dari pendapat² beberapa ahli² perentjana jang dilukiskan sbb. :

1. Planning adalah suatu sistem dari langkah²/tindakan² kebidjaksanaan jang saling bertautan untuk mentjapai tudjuan² masyarakat.
2. Planning berarti hanja penggunaan rasionil semata² dari sumber² (resources) untuk mentjapai tudjuan tertentu.
3. Planning adalah suatu prosedur jang rasionil dengan mana sumber² jang terbatas dapat digunakan sebaik mungkin agar perkembangan pembangunan dapat dipertjepat.

Djadi dengan melihat pengertian² tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa planning itu adalah suatu alat/sistem/prosedur jang rasionil untuk mempertjepat djalannya proses pembangunan guna mentjapai suatu tudjuan jang telah ditentukan terlebih dahulu, dengan menggunakan sumber² jang ada/terbatas setjara efisien.

Di Indonesia, kebutuhan akan pentingnja planning itu diartikan merupakan suatu response terhadap Amanat Penderitaan Rakjat, jang menginginkan masyarakat adil dan makmur.

B. Maksud dan tudjuan Planning.

Dengan menggunakan planning tersebut, maka akan diperoleh keuntungan² sbb. :

1. Dapat ditjari kemungkinan² jang ada dan dapat diadakan pemilihan diantara kemungkinan² itu.
2. Dengan adanya planning, maka kegiatan² jang berlebihan dapat dihindarkan.
3. Dengan adanya planning, maka terdapat suatu keseragaman dan ketertiban dalam segala usaha.
4. Perubahan² jang perlu diadakan dapat dilakukan pada waktu jang lebih tepat. Hal ini adalah karena kemungkinan adanya perubahan² dalam faktor² jang dapat mempengaruhi djalannya usaha kita.
5. Dapat diadakan pengawasan jang lebih sempurna dan lebih tepat.
6. Dengan demikian dapatlah dianggap bahwa planning itu adalah suatu alat untuk mengurangi biaya usaha² (a cost reducing tool).

Pada pertengahan abad ke-18 tiadalah perbedaan jang tajam antara kegiatan ekonomi (economic performance) dari pada ber-bagai² negeri didunia. Mengenai standard of living kemungkinannya tak berbeda, mungkin beberapa negara² sekarang termasuk developing countries seperti India, R.R.T. dan Indonesia, relatif lebih baik dari pada beberapa negara

sekarang jang termasuk advanced countries, tetapi sedjak bagian jang terachir abad ke-18, terdjadilah perobahan² jang revolusioner, mula² di Eropah jang menggunakan scientific and technological discoveries dalam bidang ekonomi jang terkenal sebagai : „revolusi industri” kemudian mendjalar ke Amerika Utara dan Djepang.

Negeri² Asia, Afrika dan Latin Amerika pada umumnja tidak mengambil bagian pada proses ini disebabkan oleh suatu perbedaan jang besar dari faktor² sedjarah. Hal ini terdjadi selama waktu kira² dua abad. Perbedaan² jang tadjam dalam aktivitas² ekonomi dari ber-bagai² negeri muntjul dan terbagilah dunia ini antara apa jang kita kenal sebagai „the developed and developing countries”, bahkan hingga kinipun djurang (gap) antara kedua group² itu makin melebar. Dengan demikian perbedaan² jang menonjol dari pada developing dengan developed countries tersebut, disebabkan kekurangan penggunaan dari pada pengetahuan² tehnik modern, (scientific and technological knowledge) dalam bidang ekonomi.

Dalam hal ini proses „innovations”, jang di-introdukir oleh „Schumpeter” meliputi spesialisasi dan pembagian kerdja dari pada labour, jaitu sebagai akibat dari suatu struktur jang kompleks dari pada aktivitas² ekonomi jang independent, jang berrasionalkan keinginan² untuk memperbesar produksi dari-pada barang² dan djasat².

Sebaliknya aktipitas² ekonomi dalam developing countries (terutama di Indonesia) adalah didalam sektor² agraria dan tradisional jang disebabkan oleh motif² untuk memenuhi kebutuhan sendiri dalam bahan makanan. Sehingga sebagai akibatnja, maka usaha bergerak kearah tehnik² dan mesin² modern jang pada dirinja lebih dapat merupakan pembagian kerdja jang lebih terperintji adalah terbatas, sehingga perkembangan kearah mempergunakan modern scientific and technological knowledge jang mana adalah sjarat mutlak untuk dapat memajukan pembangunan ekonomi dan achirnja dapat memperbesar nation income, percapita income dan stabilisasi politik.

Djika dilihat perkapita income dari developing countries adalah lebih ketjil dari pada income percapita dari negara² jang developed. Maka usaha memperbaiki hal ini fungsi/peranan pemerintah adalah penting, terutama dalam mengadakan public investment dalam bidang social overhead dan basic industries, mengadakan industrial (technological dil) research, mengusahakan penambahan supply dari entrepreneurship dan technologis melalui latihan² dan pendidikan.

Tugas ini tak dapat dilaksanakan oleh pihak swasta, oleh karena membutuhkan biaya jang sangat

*) „Term Paper” hasil Karya Kolektip peserta Kursus Perentjanaan Pembangunan jang diselenggarakan oleh BAPPENAS dari tgl. 1-11-1964 sampai 29-12-1964 di Tjipajung.

besar, risiko yang besar dan tingkat balas jasa dalam proyek tersebut dalam waktu yang pendek tidaklah terlalu tinggi/menguntungkan.

Karena itu tugas² tersebut haruslah dilaksanakan oleh pemerintah/negara jika tidak maka proses pembangunan tak dapat dimulai. Pemerintah juga bertanggung jawab atas politik proteksi terhadap industri dalam negara yang sedang tumbuh.

Hubungan antara fungsi peranan pembangunan pemerintah dan entrepreneur swasta adalah komplementer dan bukan persaingan. Pemerintah harus memberikan hidup kepada swasta terutama dalam industri barang² konsumsi dengan pelajanan social overhead dan basic industrinya.

Djadi peranan pemerintah dalam menggerakkan dan mendjalankan pembangunan tetap merupakan leading and commanding position.

Djika dilihat dari situasi developing countries pada umumnya dapat disingkat sebagai berikut :

1. Income per capita yang rendah.
2. Tingkat saving yang rendah dan sebagai akibatnya investment dari internal sources relatif kecil.
3. Tingkat teknologi dinegara lain.
4. Situasi yang dualistis yang tertjermin dari „modern enclaves” didalam ekonomi yang tradisional tanpa integrasi yang berarti antara kedua bentuk ekonomi tersebut.
5. Dominasi dari pada sektor produksi primer didalam ekonomi dan suatu tingkat output yang rendah terutama dalam bidang ekspor. Umumnya adalah produksi hasil² pertanian atau raw material c.q. mineral².
6. „Subsistence sector” jaitu produksi untuk memenuhi kebutuhan² sendiri dan pertukaran² lokal yang umumnya bersifat non-monetary, adalah relatif besar.
7. Relatif kekurangan skilled labour, entrepreneurial dan management capacity.
8. Sering terdapat suatu jumlah yang berarti dari disguised Unemployment; jaitu pekerdja yang bekerdja normal, tetapi hanya menghasilkan dalam proporsi yang kecil dari pada total output yang seharusnya.
9. Ada ketjenderungan untuk lebih senang berdagang dengan negara² yang telah berkembang (developed countries) dari pada dengan sesama negara² yang sedang berkembang (developing countries).

Dari tindjauan tersebut diatas maka hampir dapat dikatakan bahwa tujuan utama kebanyakan negara adalah menaikkan tersedianja barang² dan jasa² yang akan terlihat dalam peningkatan nasional incomenja.

Tujuan lain yang penting djuga adalah tujuan yang mempengaruhi kebijaksanaan dalam bidang ekonomi negara yang bersangkutan seperti :

1. Mempertjepat industrialisasi.
2. Modernisasi pertanian.
3. Membentuk dasar² ekonomi menuju masyarakat sosialis.

Ketiga tujuan tersebut diatas bertautan satu sama lain dimana salah satu tak dapat direalisasi dengan tidak adanya kedua tujuan yang lain.

Disamping beberapa tujuan yang disebutkan diatas masih ada tujuan² lain :

1. Menaikkan dan/atau lebih meratakan distribusi national income.
2. Menaikkan kekuatan dan mempertinggi prestasi national.
3. Mentjapai employment yang setinggi-tingginya.
4. Memperbaiki foreign exchange.
5. Mempertinggi dukungan politik terhadap pemerintah.
6. Memperketjil kerusakan² yang mungkin terdjadi dalam kebudayaan masyarakat.

Dalam kenjataanja kebanyakan negara² yang sedang berkembang (developing countries) mengukur hasil yang telah ditjapai dalam perkembangannya dalam bentuk kenaikan national incomenja.

Djadi dengan demikian djelaslah betapa pentingnya peranan planning itu dalam development baik yang bersifat ekonomi maupun yang non-ekonomi.

C. Tingkat dan Sifat² Planning.

Setjara kesatuan, **planning merupakan tiga tingkatan yang berhubungan erat satu sama lain** ialah :

1. **Aggregative Planning.**
2. **Sectoral planning.**
3. **Project planning.**

Fungsi aggregative planning ialah sebagai kerangka untuk planning² yang lebih detail. Dalam planning tersebut sesuatunya masih bersifat umum, seperti data² tentang resources yang tersedia, kesektor-sektor mana pembangunan hendak didjalankan, bagaimana pembangunan harus didjalankan.

Aggregative planning itu djuga memuat tujuan² pembangunan dalam batas waktu yang ditentukan. Langkah selanjutnya setelah penentuan overall planning ialah penentuan sectoral planning berupa penentuan tugas², pembiajaan, target² dan bagaimana tiap² sektor ekonomi harus dibangun.

Sesudah sectoral planning ditentukan langkah selanjutnya ialah penentuan project² planning berdasarkan ketentuan² yang terdapat dalam sectoral planning masing².

Planning bagaimana djuga memerlukan tindakan² yang simultan, suatu perubahan yang terdjadi dalam aggregative planning memerlukan perubahan² dalam sectoral dan project planning dan sebaliknya.

Berdasarkan lamanja waktu untuk pelaksanaan suatu planning maka **planning dibedakan 3 golongan**

1. **Short term planning.**

Planning ini umumnya berdjangka 1 tahun di beberapa negara seperti Sovjet Rusia djangka waktu itu 2 tahun.

Pembiajaan planning ini tertjantung dalam anggaran Belandja Tahunan dan dibiajai oleh sumber² keuangan negara yang normal.

2. Long-term planning.

Planning ini ditetapkan untuk jangka waktu panjang \pm 20 tahun juga disebut perspective planning.

Project² yang memerlukan jangka panjang seperti infra struktur dan usaha² untuk menambah skill untuk human resources, umumnya dimasukkan dalam kategori long-term planning. Tujuan Planning ini ditetapkan berdasarkan analisa ekonomi yang hendak dibangun, selain itu strategi pembangunan telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan long-term planning ini harus tersedia waktu medium planning (5 s/d 8 tahun) untuk implementasi² yang diperlukan.

3. Medium Planning.

Planning ini berjangka 5 - 8 tahun.

Type planning itu sering disebut „implementation Plan”, didalam mana penilaian pembangunan setjara keseluruhan diadakan dengan tujuan untuk melenjapkan bottleneck yang mungkin diantara sektor² ekonomi. Disamping itu kalkulasi mengenai potensi national resources diadakan untuk menentukan apakah target² yang ditentukan dalam long-term plan dapat ditjapai atau tidak.

Plan² diatas dalam bentuk² yang detail dan konkrit disebut operational plan. Berdasarkan bagaimana planning itu dilaksanakan maka dapat dibedakan dalam 2 bentuk planning :

Planning by inducement.

Peranan negara dalam hal ini terbatas pada pemberian dorongan²/bantuan² kepada sektor² ekonomi dengan tujuan dapat mempengaruhi mekanisme pasar untuk memungkinkan adanya mobilitas factor² produksi dan barang² serta jasa² setjara sempurna. Dalam planning ini kepada partikelir/swasta diberikan kebebasan yang luas sebagai subjek ekonomi.

Planning by direction.

Dalam planning ini swasta tidak dapat berbuat kebebasan masing². Subjek² ekonomi diharuskan menuruti peraturan²/petunjuk² Pusat. Djadi tugas perentjana dalam hal ini menjadi sangat berat dan planning itu menjadi kurang luwes (flexible).

Active/Passive Planning.

Dalam active planning pemerintah turut serta mengambil bagian dalam melaksanakan planning itu bersama sama dengan pihak swasta, misalnja dalam pembangunan infra struktur. Sebaliknya dalam passive planning pemerintah hanya membuat planning dan pelaksanaannya dilakukan sepenuhnya oleh pihak swasta. Disamping itu, bila planning itu berlaku untuk seluruh wilayah Negara dinamakan National Planning dan bila hanya untuk sebagian dalam Wilayah Negara itu disebut Regional Planning, dan bila kegiatan² yang diatur bersifat menjeluruh (Eko-

nomi Politis dan Social) dinamakan overall Planning.

Sifat khusus dari Regional Planning diatas tidak boleh bertentangan dengan National Planning.

D. 4. Process Planning.

Tiap² tingkat dalam process planning informasi dan analisa tetap dibutuhkan. Kebutuhan yang spesifik dari tiap² waktu tergantung dari jenis masalah yang dihadapi Planner.

Dengan demikian masalah² yang actual dari planning akan menentukan aktivitas² dari research yang harus men-supply informasi² untuk Badan² Planning. Djadi hasil research ini akan berguna dalam mengambil kebidjaksanaan yang diharapkan setjara teliti dari hasil tindakan² Planner. Sebelum rentjana disusun, diadakan terlebih dahulu penjelidikan tentang potensial² yang ada, seperti sumber daya manusia, modal, peralatan, potensi regional dan nasional, psikologis masyarakat, keadaan mental, managerial dan technical skill yang dimiliki masyarakat dan efisiensi administrasi Negara.

Dengan adanya data² yang telah kita research itu baik bersifat kuantitatif, kualitatif maupun perimbangan proportionnnya maka dapatlah kita tentukan/susun rentjana yang kita akan buat. Dalam penjurusan dari rentjana tersebut pertama-tama ditentukan Aggregative planning ini fungsinya hanya sebagai dasar dari penjurusan planning lebih lanjut yang lebih bersifat mendetail, jaitu dalam bentuk : sectoral planning dan project planning.

Project Planning ini haruslah sesuai dengan sectoral planning dan aggregative planning. Dalam penjurusan planning tersebut haruslah :

1. Didasarkan atas data² yang reliable.
2. Ditentukan target² yang ingin ditjapai.
3. Strategy pelaksanaannya.

Setelah itu harus pula dinilai, apakah penjurusan planning tersebut :

1. Efficient.
2. Consistent.

Factor efisiensi dalam arti setiap program dapat mewujudkan hasil² maksimum yang ingin ditjapai. Tingkat efisiensi mana dinjatakan dalam bentuk cost and benefit ratio atau marginal efficiency of capital dari project yang bersangkutan dibandingkan dengan cost benefit ratio dari project² yang masih merupakan alternative ataupun dari project² yang telah ada. Factor consistency dalam arti bahwa bagian² program pembangunan setjara keseluruhan harus saling bertautan. Ini berarti bahwa expected demand dan expected supply baik dibidang factor produksi maupun barang² dan jasa² haruslah seimbang. Untuk itu suatu input-output analysis yg kompak harus dibuat, mengingat adanya interrelated sectors of production. Ini berarti bahwa suatu keseimbangan dalam pembangunan perlu dipegang teguh. Berdasarkan kedua faktor tersebut diatas projek pembangunan haruslah dimulai pada sektor dimana investasi memungkinkan

(Bersambung ke hal. 37)

Commodities

LAPORAN PELELANGAN TEMBAKAU DI BREMEN HASIL PANEN TAHUN 1963

Dengan terselenggaranja pelelangan (Extra) tembakau Djawa pada tanggal 24/25 Maret 1965 jang lalu, maka kampagne pendjualan tembakau panen tahun 1963 telah selesai, dengan dilangsungkannja 11 pelelangan :

Pelelangan tembakau Sumatra I — 14 Mei 1964
 Pelelangan tembakau Sumatra II — 4 Djuni 1964
 Pelelangan tembakau Sumatra III — 2 Djuli 1964
 Pelelangan tembakau Sumatra IV — 30 Okt. 1964
 Pelelangan tembakau Djawa I — 16/17 Djuli '64
 Pelelangan tembakau Djawa II — 10/11 Sept. '64
 Pelelangan tembakau Djawa III — 23/24 Sept. '64
 Pelelangan tembakau Djawa IV — 14/15 Okt. '64
 Pelelangan tembakau Djawa V — 28/29 Okt. '64
 Pelelangan tembakau Djawa VI — 25/26 Nop. '64
 Pelelangan tembakau Djawa Extra — 24/25 Maret 1965

dengan menghasilkan DM. 190.251.544.— jang perintjiannja sebagai berikut :

Pendjualan dilelang :

a. Tembakau Sumatra : 26.863 baal.....
 DM. 78.566.694,—
 b. Tembakau Djawa : 108.779 baal.....
 DM. 77.256.044,—
 135.642 baal.....
 DM. 155.822.738,—

Pendjualan lain diluar lelang :

a. Dibawah-tangan : 107.953 baal.....
 DM. 30.647.114,—
 b. Uitslijt : 25.110 baal.....
 DM. 9.781.692,—
 133.063 baal.....
 DM. 40.428.806,—

I. Tjiri² pendjualan tembakau tahun 1964 ialah :

- Mutu tembakau jang disadjikan merupakan tembakau jang kekurangan hudjan (onberegend); daun² kurang volgrotid, kurang tipis, pun rasanja agak ke-manis²an, daja-bakar kurang, semuanja itu merupakan hal² jang kurang dapat diterima oleh pengusaha² Tjerutu.
- Lengte sortatie pada umumnja mendapat penghargaan besar sekali dari para pabrika, karena lebih mudah memilih dan mengerdjakannja.
- Suasana pasar jang hangat sampai panas disebabkan karena antara lain :
 - adanja Terry Report jang menjebakkan fabricage tjerutu dan tembakau pipa melontjat.
 - Amerika sangat aktif berusaha mendapatkan tembakau untuk isi tjerutu (Einlage).



- Inggeris, jang karena supply dari Amerika sangat berkurang, djuga sangat giat berusaha mendapatkan tembakau Deckblatt dan Umblatt.
 - mendjelang achir tahun 1964 tersiar berita² dari Indonesia, bahwa hasil panen tahun 1964 djauh lebih kurang dari panen tahun 1963.
 - Situasi Politik disekitar Tanah Air mungkin mempunjai pengaruh pula.
 - Pendjualan² setjara flat dari Indonesia dan party² tembakau dari new-comers/incidentele Eksportir jang sortatie dan mutunja kurang memenuhi sjarat mempunjai pengaruh terhadap prijsvorming dipasaran tunggal Bremen sini.
- II. Dengan membuatja daftar² tertjantum pada halaman 23-25 dapat kiranja di-ikuti, bahwa
- djumlah tembakau jang didjual djauh lebih besar dari pada tahun² sebelumnja, baik dalam pelelangan maupun diluar pelelangan (onderhands dan uitslijt).
 - hasil pendjualan idem dito.
 - mengingat bahwa tembakau onberegend dan djumlah jang disadjikan dalam lelang djauh lebih besar dari tahun 1963 (exclusief Sumatra), maka harga jang tertjapai sangat memuaskan, bahkan ada jang mengatakan „t duur betaald“.
- Perlu dikemukakan disini bahwa dalam penilaian djumlah penghasilan serta averag price-nja, harus diketahui bahwa persentase dari djenis² tembakau jang bermutu baik djauh lebih kurang dari panen tahun 1963 sedangkan pendjualan diluar pelelangan merupakan pendjualan party² tembakau jang bermutu kurang sampai rendah, barang mana memang bukan merupakan bahan untuk pelelangan.
- III. Policy pendjualan dan policy harga :
Seperti telah beberapa kali kami kemukakan

perkembangan harga adalah sedemikian rupa, sehingga dapat mengawatirkan kelangsungan pembelian para pengusaha tjerutu, terutama jang memproduceer consumer goods.

Oleh karena itu dengan sangat hati² sekali diusahakan agar harga dapat **tenang** dengan tjara lebih banjak menjadikan tembakau dalam pelelangan (tahun² jang lalu djumlah sadjian maximaal 14.000 baal pada setiap pelelangan, dalam tahun 1964 ini antara 14.500 baal sampai 16.000 baal tembakau Djawa).

Dengan menjadikan djumlah² jang besar dalam pelelangan, maka sudah barang tentu perkembangan harga tidak akan dapat tadjam sekali. Akan tetapi sebaliknya diusahakan agar peminat-peminat ketjil dan sedang, mempunyai kesempatan pula untuk masuk/membeli setjara langsung dalam pelelangan sendiri, dengan menjadikan party² jang djumlahnja/mutunja sedang dalam pelelangan.

Dengan tjara demikian diharapkan tertiptanja **persaingan jang lebih luas**, tidak hanja terbatas kepada pengusaha-pengusaha/industri dan pedagang besar sadja.

Selain dari pada itu, mengingat bahwa tembakau P.P.N. pada umumnya merupakan inti dari tembakau Indonesia, maka penjurusan pelelangan senantiasa diatur sedemikian rupa sehingga tembakau P.P.N. dapat mempengaruhi prijsvorming tembakau milik perusahaan² negara dan Swasta lainnja.

Pendjualan diluar pelelangan kini dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga :

- a. para importir memupuk kepertjajaan dari para pembeli, terutama para industri dan supaja berusaha mendapatkan langganan tetap, dengan tidak meninggalkan bargaining postie-nja.
- b. para pengusaha/pabrikian mempunyai perasaan tenang dan tenteram, karena akan mendapat supply jang teratur.

Dengan dasar² seperti tsb. diatas diusahakan pasaran akan tetap tenang, disampingnja sebetulnja merupakan persiapan² apabila dikemudian hari ada perubahan² dalam tjara/tempat pendjualan.

Policy pendjualan tersebut diatas dilakukan, djuga semata-mata untuk dapat mempertahankan dan untuk selandjutnja meluaskan pasaran tembakau Indonesia, dengan mengingat saingan² jang dihadapi dari :

- a. tembakau Camerun, jang dalam tahun 1965 ini akan menjadikan djumlah² tembakau 2 kali lebih besar dari sadjiannja tahun jang lalu dan mengenai mutunja diramalkan djuga lebih baik dari panenann tahun 1963. Hasil produksi tembakau Camerun panenann 1963 jang dilelangkan tahun 1964 telah mentjapai 7.153 baal dan mutunja tjukup baik.

- b. tembakau Sub Tropicali Italia, jang djuga diramalkan akan menjadikan djumlah² jang lebih besar dari tahun jang lalu dengan selalu diusahakan perbaikan² dalam mutu dll. sehingga lebih memenuhi kehendak para pabrikian.
- c. last but not least : tembakau tiruan H.T.L.

Terutama tembakau jang disebutkan terachir ini, perkembangannja pesat sekali.

Kalau semula produksinja hanja terbatas kepada Umblatt sadja (jang sudah mengantjam terutama tembakau Besuki), kini sudah meluas dengan pembikinan Deckblatt.

Bahaya² jang mengantjam tembakau (terutama Besuki) ialah, apabila tembakau Besuki harganja terlalu tinggi, maka banjak para pabrikian tjerutu, terutama jang mengerdjakan tjerutu mura-han (consumer goods) jang merupakan persentase terbesar, dapat memalingkan kepada tembakau lain (baik tembakau dari negara lain jang lebih murah maupun H.T.L.).

Apabila pabrik² tsb. sudah mulai mempergunakan tembakau djenis lain, maka sempitlah pasaran bagi tembakau kita.

Akan lebih sukar untuk mendapatkan pasaran kembali jang telah hilang dari pada mentjarikan pasaran baru, oleh karena mana hendaknja harus diusahakan supaja pasaran tetap tenang dan prijsniveau djangan terlalu tinggi, demi untuk kelangsungan pasaran (afzet) tembakau Indonesia.

Dimana pada umumnya tembakau Indonesia senantiasa ditjari/dibutuhkan oleh para pengusaha dan mudah mendapatkan pembelinja, maka bagi djenis tembakau Bodjonegoro dan Djombang tidaklah demikian halnja, untuk djenis² tembakau tsb. agak sukar mendapatkan pembelinja, karena tembakaunja umumnya terlalu „manis” dan ada kalanja tertjampur dengan lain djenis tembakau.

IV. Tembakau Sopeng.

Tembakau Sopeng panenann 1963 telah berhasil didjual lewat pelelangan extra dalam bulan Maret 1965 dengan hasil jang sesuai dengan kwalitas tembakaunja.

Kwalitas daunnja sudah dapat dikatakan tjukup menarik sebagai umblatt dan sedikit untuk deckblatt.

Daunnja lebar² serta elastis dan tjabang-gagang pun ketjil sehingga besar harapan untuk dihari depan sebagai deck-material jang sudah tentu harga tidak seperti deckblatt Deli.

Jang sekiranja masih perlu segera diperbaiki diantaranya :

- a. Rasanja masih agak keras (tadjam)
- b. Sukar terbakar.

Sortatie serta pengolahan, sebagai usaha pertama dalam pertembakauan dapat dinjatakan sudah tjukup baik, begitupun pembungkusannja sangat baik dan rapih.

Memang tembakau Soppeng yang masih pertama-tama diadjudkan didepan para pembeli, tentu mereka tidak akan tergesa-gesa setjara berani menilai dan membeli dengan harga yang tinggi seperti tembakau Besuki yang sudah bertahun-tahun dikenal diantara para industric tjerutu. Dengan perbaikan² dalam daja-bakar serta rasa tsb. pasti tembakau Soppeng merupakan tembakau yang berarti dalam memperbesar djumlah produksi deck-material dipasaran dunia, mengingat harga deck-blatt Deli makin tahun makin naik yang sangat sukar untuk diikuti oleh para industrie ketjil.

V. **Perkembangan Harga :**

Berkat pengertian baik dari Pemerintah Pusat terhadap persoalan² yang harus dihadapi di Eropa (Bremen) sini, maka oleh Pemerintah Pusat telah ditetapkan, bahwa :

- a. Ekspor tembakau ke Eropa Barat harus dilaksanakan setjara amanat (konsinjasi) via pasaran tunggal Bremen.
- b. Dalam pelaksanaan pendjualan setjara flat, Djakarta akan senantiasa minta advies Bremen mengenai harga, pembeli dll. satu dan lain untuk memelihara keutuhan pasaran tunggal diluar negeri.
- c. Pengakuan eksportir tembakau dilakukan menurut sjarat² lama, yang betul² mendjamin kelangsungan berusaha dan ketenangan pasaran dalam negeri :
 1. pengalaman dalam perdagangan luar negeri (Angka pengenal Umum).
 2. Ada mempunjai ahli tembakau
 3. Mempunjai investatie dalam pertembakauan :
memiliki gudang² pengeringan (hangschuren), pemeraman fermentatie), sortatie, afpak dll.

sedangkan incidentele eksportir tembakau tidak akan diladeni lagi.

- d. Tembakau di-ikat (diunting) dengan daun tembakau, tidak lagi dengan tali bambu/agel, halmana mendapat sambutan baik sekali dari para pembeli/pabrikan, karena mereka tidak perlu lagi mengeluarkan ongkos² extra untuk menghilangkan tali tsb.
- e. Berusaha setjara giat agar produksi tembakau lebih baik, quantitatief maupun qualitatief.

Melihat akan kenjataan² sperti yang telah kami uraikan diatas, dapatlah dikatakan bahwa perkembangan harga dalam tahun 1964 adalah tjukup baik dan tidak mengetjewakan karena mengingat :

- a. Panenan tembakau 1963 djumlahnja termasuk besar dibandingkan dengan hasil panenan tahun yang lalu.
- b. Mutu tembakau yang disadjikan tidak sebaik tahun yang lalu serta prosentase deck dan umblatt sangat ketjil ditambah adanya sifat² onberegend.

- c. Kehausan para pabrikan terutama akan bahan² deck dan umblatt yang belum dapat dipenuhi.

Sebagai kesimpulan dapatlah dikemukakan disini, bahwa pada umumnja harga rata² pendjualan tembakau tahun 1964 telah mentjapai kenaikan dibandingkan dengan harga rata² yang ditjapai dalam tahun 1963.

Untuk sekedar perbandingan, dibawah ini kami sadjikan harga rata² yang tertjapai dalam tahun 1963 dan 1964 sbb. :

Tembakau Sumatra PPN. :

1964	—	26.672 bal Ø DM.	18,90/½ kg.
1963	—	29.331 bal Ø DM.	19,26/½ kg.

Tembakau Tjintaradja :

1964	—	774 bal Ø DM.	10,62/½ kg.
1963	—	787 bal Ø DM.	7,43/½ kg.

Tembakau Djawa (Besuki):

milik PPN.

1964	—	35.503 bal Ø DM.	4,99/½ kg.
1963	—	22.454 bal Ø DM.	5,90/½ kg.

Tembakau Vorstenland :

milik PPN./Dana Milik

1964	—	17.146 bal Ø DM.	4,53/½ kg.
1963	—	10.400 bal Ø DM.	4,34/½ kg.

Tembakau Djawa Swasta :

1964	—	54.437 bal Ø DM.	2,91/½ kg.
------	---	------------------	------------

(pelelangan)

1963	—	28.211 bal Ø DM.	2,49/½ kg.
------	---	------------------	------------

Demikian pula perkembangan harga dalam tahun 1965 ini kiranja akan tetap stabil dengan tendensi naik, karena :

- a. Produksi tjerutu/tembakau pipa walaupun sudah tenang, tetapi lebih besar dari tahun² yang lalu sehingga kebutuhannja akan lebih besar pula dari tahun² yang lewat.
- b. Produksi tembakau walaupun dibeberapa negara sedang dan sudah diusahakan pengluasan², tetapi tetap terasa akan kekurangan tembakau, terutama untuk Deck/Umblatt dan Einlage.
- c. Hasil panen 1964 untuk tembakau Besuki jang djauh lebih kurang djumlahnja dari hasil panenan 1963.

Untuk mendapatkan harga yang sebaik-baiknya maka hendaknja bimbingan/perhatian dan pengawasan yang lebih baik/besar terhadap pengolahan, sortatie, pengepakan tembakau serta pengapalannya supaya dapat disesuaikan dengan rentjana pelelangan tahun 1965 ini, yakni :

Pelelangan Tembakau :

Sumatra	—	II	—	tgl. 13 Mei 1965
Sumatra	—	III	—	tgl. 3 Djuni 1965
Sumatra	—	IV	—	tgl. 25 Djuni 1965
Djawa	—	I	—	tgl. 8 Djuli 1965
Djawa	—	II	—	tgl. 15 Djuli 1965
Sumatra	—	V	—	tgl. 9 September 1965
Djawa	—	III	—	tgl. 23 September 1965
Djawa	—	IV	—	tgl. 7 Oktober 1965
Djawa	—	V	—	tgl. 21 Oktober 1965
Djawa	—	VI	—	tgl. 4 Nopember 1965
Sumatra	—	I	—	tgl. 18 Nopember 1965

**DAFTAR HASIL PENJUJUALAN TEMBAKAU
PANEN 1963.**

KOMISIONER	PENJUJUALAN DALAM PELELANGAN				PENJUJUALAN DILUAR PELELANGAN				JUMLAH JANG TERDUAL	
	TEBAKAU SUMATRA		TEBAKAU DJAWA		UNTERHAND		UITSLIJT		BAAL	DM
	BAAL	DM	BAAL	DM	BAAL	DM	BAAL	DM	BAAL	DM
1. D.I.T.H.	26.089	79.922.455.—	35.300	33.576.334.—	583	347.001.—	—	—	61.972	110.945.790.—
2. JAJASAN PERRIN	—	—	17.146	12.115.275.—	—	—	—	—	17.146	12.115.275.—
3. YUDA NIAGA	—	—	1.896	872.360.—	—	—	—	—	1.896	872.360.—
4. CENTRAL TRADING	—	—	6.081	4.849.320.—	193	69.094.—	—	—	6.274	4.918.414.—
5. BANJU MUKTI	—	—	724	392.408.—	1.044	344.520.—	—	—	1.768	736.928.—
6. LIEM SWIE HWA	—	—	1.105	382.198.—	3.195	996.840.—	—	—	4.300	1.379.038.—
7. TULUS REDJO	—	—	1.960	1.200.064.—	—	—	11.656	3.636.672.—	13.616	4.836.736.—
8. W E S E R	—	—	4.735	3.051.989.—	8.426	1.887.424.—	—	—	14.023	5.325.589.—
9. R E S T U	—	—	862)	386.176.—	—	—	—	—	18.032	4.929.169.—
10. A. ISMAIL	—	—	2.658	1.024.173.—	15.374	3.904.996.—	—	—	12.970	6.387.009.—
11. INTRAPORT	.774	1.644.239.—	4.618	2.196.562.—	7.578	2.546.208.—	—	—	12.114	3.801.623.—
12. E M E N E M	—	—	2.616	1.484.111.—	9.498	2.317.512.—	—	—	2.057	868.149.—
13. RAMBI BARU	—	—	1.211	643.113.—	846	225.036.—	—	—	9.357	3.635.693.—
14. J. SCHUBACK & SOHNE	—	—	3.619	1.799.533.—	5.738	1.836.160.—	—	—	2.546	1.035.448.—
15. FRESE & RIESCH	—	—	785	510.670.—	1.761	524.778.—	—	—	2.743	1.178.183.—
16. CONTINENTALE P.G.	—	—	2.094	932.861.—	649	245.322.—	—	—	3.290	1.250.434.—
17. MACLAINE, WATSON CO	—	—	1.622	746.698.—	1.668	503.736.—	—	—	—	—
18. T.E.I.C.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D J U M L A H	26.863	78.566.694.—	96.155	70.610.590.—	69.389	19.087.231.—	20.223	7.046.338.—	212.630	175.310.853.—
Pendjualan dalam tahun 1965, pelelangan extra tgl. 24/25 Maret 1965 dan pendjualan lain*.	—	—	12.624	6.645.545.—	38.564	11.559.883.—	4.887	2.735.354.—	56.075	20.940.691.—
D J U M L A H B E S A R	26.863	78.566.694.—	108.779	77.256.044.—	107.953	30.647.114.—	25.110	9.781.692.—	268.705	196.251.544.—
BAHAN PERBANDINGAN : Panen tahun 1962, Didjual tahun 1963	29.741	85.745.497.—	55.194	45.138.264.—	58.334	17.484.304.—	31.282	14.094.775.—	181.478	165.220.825.—

DAFTAR PEMBELI TEMBAKAU MENURUT NEGARA
(Pendjualan di pelelangan)

KOMISIONER	Tembakau BPU. PPN. Tembakau		Tembakau BPU. PPN. Tembakau		BPU/PPN dan Dana/ Sawarno		Tembakau Swasta termasuk P.N.	
	SUMATRA		DJAWA — BESUKI		DJAWA-VORSTENLAND		DJAWA — (BESUKI — VORSTENLAND — dll)	
	BAAL	DM	BAAL	DM	BAAL	DM	BAAL	DM
1. BELANDA	9.924	30.111.000.—	17.576	18.415.000.—	6.023	4.469.000.—	30.058	16.217.498,—
2. DJERMAN	4.474	8.082.000.—	11.379	8.435.000.—	11.700	6.648.000.—	17.423	10.102.703,—
3. INGGERIS	5.699	23.089.000.—	2.097	1.354.000.—	1.319	1.293.000.—	889	719.068,—
4. BELGIA	3.019	5.910.000.—	1.719	1.689.500.—	—	—	913	591.772,—
5. DENMARK	3.115	6.793.000.—	992	1.346.000.—	—	—	1.611	1.483.216,—
6. SWISS	—	—	654	750.000.—	—	—	2.130	921.420,—
7. SWEDIA	402	1.779.000.—	461	271.000.—	—	—	780	336.960,—
8. PRANTJIS	—	—	333	214.500.—	—	—	126	56.078,—
9. AUSTRIA	—	—	89	54.000.—	—	—	507	263.360,—
10. NORWEGIA	39	101.000.—	—	—	—	—	—	—
D J U M L A H	26.672	75.865.000.—	35.300	32.529.000.—	19.042	12.410.000,—	54.437	30.692.075,—

Tjataan :

Bremen, April 1965.

1. Tembakau Djawa-Besuki milik PPN. tsb. diatas tidak termasuk dijumlah
203 baal jang didjual kepada Assuransi.

2. Tembakau Sumatera tsb. diatas tidak termasuk 583 baal jang didjual
diluor lelang kepada Pedagang Djerman.

**DAFTAR RISALAH PENDJUALAN TEMBAKAU
TAHUN 1959 - TAHUN 1964**

TAHUN PENDJUALAN	PENDJUALAN DALAM PELELANGAN							
	TEMBAKAU SUMATRA				TEMBAKAU DJAWA			
	P.P.N.		LAIN*		P.P.N.		LAIN*	
	BAAL	DM	BAAL	DM	BAAL	DM	BAAL	DM
1959	22.629	76.333.740.—	1.034	2.523.564.—	37.842	32.723.954.—	25.837	16.066.384.—
1960	26.819	62.693.790.—	767	1.282.346.—	45.447	23.268.709.—	31.322	12.788.458.—
1961	24.196	63.526.516.—	816	1.076.510.—	33.747	22.589.388.—	43.075	17.912.792.—
1962	22.891	80.214.690.—	629	1.410.000.—	42.277	33.700.610.—	37.420	20.239.269.—
1963	28.954	84.575.497.—	787	1.170.000.—	33.910	33.169.775.—	28.211	14.726.474.—
1964	26.089	76.922.455.—	774	1.644.239.—	54.342	46.563.969.—	41.813	24.046.621.—
1965	—	—	—	—	482	409.342.—	12.142	6.236.112.—

TAHUN PENDJUALAN	PENDJUALAN DILUAR LELANG				DJUMLAH SEMUA	
	UNTERHAND		UTSLEJIT		BAAL	DM
	BAAL	DM	BAAL	DM		
1959	14.625	6.610.136.—	27.194	11.597.220.—	129.161	145.854.998.—
1960	14.569	2.996.890.—	29.189	11.234.213.—	148.113	114.534.406.—
1961	27.993	8.136.777.—	32.096	11.978.120.—	161.920	125.220.604.—
1962	48.479	15.481.281.—	40.568	15.921.399.—	192.214	166.967.249.—
1963	58.334	17.484.309.—	31.282	14.094.775.—	181.568	165.220.825.—
1964	69.389	19.087.231.—	20.223	37.046.338.—	212.630	175.310.853.—
1965	38.564	11.559.883.—	4.887	2.735.354.—	56.075	20.940.691.—

Tjataan Red :

Dalam nomor jg. akan datang, di-sadjikan mengenai kwalitas Tembakau.

C.V. 'NAROTAMA'

EXPORTERS, IMPORTERS & GENERAL AGENTS

DJALAN TOKO TIGA 55

TELEPON 21686

DJAKARTA KOTA

Cables : NAROTAMA DJAKARTA

EXPORT :

- * **COPRA**
- * **RUBBER**
- * **PEPPER**
- * **COFFEE**
- * **LUMBER**
- * **NUTMEGS**

IMPORT :

- * **ALL KINDS OF COMMODITIES**

ORGANISASI DAN SUSUNAN DIREKTORAT IMPOR

KEPUTUSAN

Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri
No. 028/4/MPLN/SK/65 Tahun 1965.

KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

MENIMBANG :

bahwa dengan Surat Keputusan Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri No. 001/3/MPLN/SK/65 tgl. 15 Maret 1965 telah ditetapkan organisasi dan susunan dari Urusan Perdagangan Luar Negeri; bahwa dalam Surat Keputusan tersebut telah ditetapkan pula fungsi dan kegiatan² dari Direktorat Impor; bahwa susunan dan tugas dari Bagian-bagian dan Seksi-seksi Direktorat Impor perlu ditetapkan;

MENGINGAT :

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 tahun 1965 tanggal 10 Pebruari 1965; Surat Keputusan Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri No. 001/3/MPLN/SK. 65 tanggal 15 Maret 1965.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Organisasi dan Susunan Direktorat Impor, sebagai berikut :

BAB I

Pasal 1.

KEUDUDUKAN :

Direktorat Impor merupakan bagian dari Urusan Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 2.

TUGAS POKOK :

Mengatur dan mengawasi kelantjaran pelaksanaan kebidjaksanaan dibidang impor sebagaimana tersebut dalam pasal 7 Surat Keputusan Menko Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri No. 001/3/MPLN/SK/65 tanggal 15 Maret 1965.

BAB II

ORGANISASI DAN SUSUNAN (bagan terlampir)

Pasal 3.

Direktorat Impor terdiri dari :

1. Kepala Direktorat.
2. Wakil Kepala Direktorat.
3. Bagian Planning dan Programming.
4. Bagian Umum dan Pelaksanaan.

BAB III

FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 4.

1. Kepala Direktorat Impor memimpin, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas² Direktorat Impor seperti tertantum dalam pasal 7 surat keputusan Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri No. 001/3/MPLN/SK/65 tgl. 15 Maret 1965.
2. Dalam hal Kepala Direktorat Impor tidak berada ditempat, maka pimpinan diwakilkan kepada Kepala Bagian Umum dan Pelaksanaan, yang selanjutnya dinamakan Wakil Kepala Direktorat Impor.

Pasal 5.

I. Bagian Planning dan Programming.

Kegiatan-kegiatanja a.l. :

A. Menjusun Rentjana Impor Barang untuk :

- a. konsumsi.
- b. bahan baku, bahan penolong dan alat² pengganti (spare parts).
- c. Alat² modal.

B. Turut serta dalam segala pembitjaraan² mengenai perdagangan impor diluar negeri maupun didalam negeri.

C. Turut serta dalam menjusun dalam Neratja Pembajaran.

D. Mengikuti perkembangan perdagangan internasional dan menempatkan petugas²nja diluar negeri bilamana perlu.

E. Menjelidiki dan menentukan segala sesuatu²nja agar dapat melakukan pembelian yang sangat menguntungkan mengenai :

- a. djenis barang dan negara asalnja.
- b. harga barang.
- c. waktu penjerahan.
- d. tjara pembelian.

F. Pembentukan Tjabang Direktorat Impor (DIM) didaerah :

- a. Dengan persetujuan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri, Kepala Direktorat Impor mengadakan/mendirikan Tjabang² DIM di-tiap² Daerah Daswati I.
- b. Tjabang DIM tersebut dalam ayat a, bertugas untuk membantu Kepala Direktorat Impor untuk a.l. :
 - aa. merumuskan rentjana² impor untuk daerah Daswati I.
 - bb. merumuskan kanalisasi barang² impor ke-aparat² produksi dan menggariskan system distribusi ke-konsumen di Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

II. Bagian Umum dan Pelaksanaan.
Kegiatan-kegiatanja antara lain :

A. Pendjataan :

- a. Melakukan Pendjataan.
- b. Menerima laporan pendjataan dari penerima djatah jbs.
- c. Menerima laporan realisasi sumber² impor lainnja diluar R.I.B.

B. Pengawasan :

- a. Mengawasi pelaksanaan pendjataan.
- b. Menerima dan mengolah laporan² mengenai pelaksanaan impor.

C. H u k u m :

Mengeluarkan peraturan mengenai hal² jang berhubungan dengan perdagangan impor.

D. Penggolongan barang² :

Menetapkan penggolongan ekonomi untuk barang² jang dibutuhkan demi kepentingan prioritas Impor.

E. Pengakuan dan Pengawasan Importir :

Memberikan pengakuan importir dan mengawasi bonafiditas para importir.

F. U m u m :

- a. mengurus hal² kepegawaian, anggaran belandja dan keuangan;
- b. mengurus hal² jang bertalian dengan gedung², rumah tangga dan peralatan;
- c. melaksanakan pekerdjaan arsip, tik dan ekspedisi;
- d. mengurus kesedjahteraan para pegawai dalam arti kata seluas-luasanja;

e. tugas² lainnja dalam bidang administrasi jang ditetapkan oleh Kepala Direktorat Impor.

BAB IV.

**KETENTUAN-KETENTUAN
 PERALIHAN/PENUTUP**

Pasal 6.

Tata-kerdja dari Direktorat Impor akan ditetapkan lebih landjut oleh Kepala Direktorat Impor

Pasal 7.

Hal-hal jang belum tjukup atau belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih landjut oleh Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri/Kepala Direktorat Impor.

Pasal 8.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan untuk seterusnya berlaku suru sampai tanggal 15 Maret 1965.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 26 April 1965

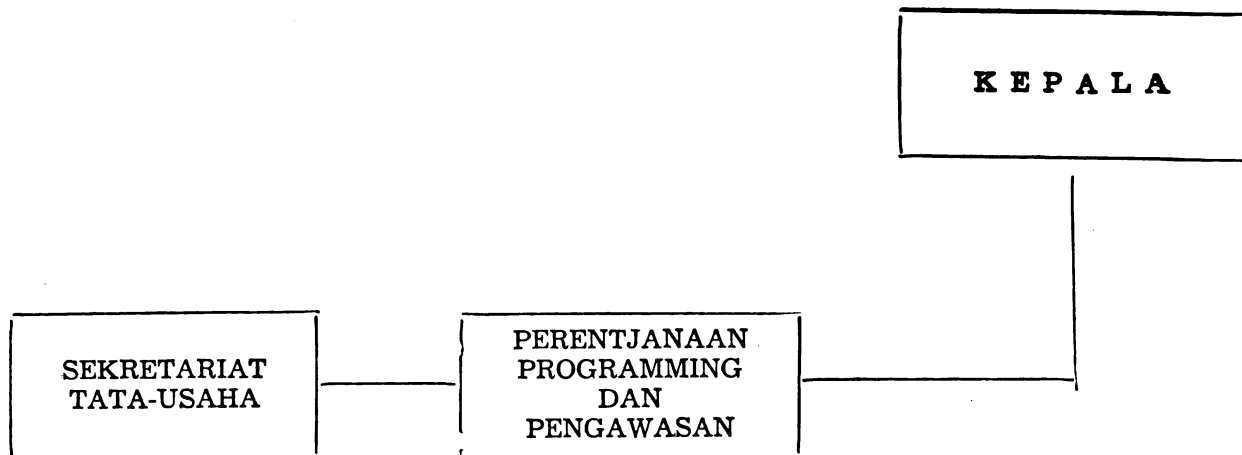
**KUASA MENTERI PERDAGANGAN
 LUAR NEGERI,**

t.t.d.

A. J U S U F

Brig. Djendral T.N.I.

BAGAN DIREKTORAT IMPOR



LUAR NEGERI
 Bila Perlu.

Organisasi dan Susunan Direktorat Pengadaan dan Penjaluran

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI No. 027/MPDN/SK/65

MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI,

MENIMBANG :

Bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri tanggal 9 April 1965 No. 001/MPDN/SK/65 telah ditetapkan susunan dan tugas Departemen Perdagangan Dalam Negeri; Bahwa dalam Surat Keputusan tersebut telah ditetapkan pula tugas Direktorat Pengadaan dan Penjaluran;

Bahwa susunan dan tugas dari bagian² dan seksi² Direktorat Pengadaan dan Penjaluran perlu segera ditetapkan dan disesuaikan dengan prinsip² bekerdja setjara efisien serta berlandaskan susunan dan tugas yang efisien pula.

MENGINGAT :

Surat Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri tanggal 9 April 1965 No. 001/MPDN/SK/65.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Organisasi dan Susunan Direktorat Pengadaan dan Penjaluran sebagai berikut :

Pasal 1.

Direktorat Pengadaan dan Penjaluran dipimpin oleh Kepala Direktorat Pengadaan dan Penjaluran yang dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibantu oleh Wakil Kepala Direktorat Pengadaan dan Penjaluran.

Pasal 2.

Direktorat Pengadaan dan Penjaluran terdiri atas bagian yakni :

- Bagian Tata-Usaha;
- Bagian Perlengkapan/Pengangkutan;
- Bagian Penjaluran Perusahaan;
- Bagian Perkembangan Perdagangan/Perdagangan Antar Pulau/Pengumpulan;
- Bagian Organisasi Perdagangan.

Pasal 3.

Kegiatan-kegiatan Bagian Tata Usaha antara lain adalah :

Melaksanakan dan memelihara pekerjaan administratif sehari-hari Urusan Umum dan Rumah Tangga Direktorat.
Mengurus hal² mengenai Kepegawaian dan Keuangan menurut peraturan² Pemerintah dan berdasarkan kebijaksanaan Kepegawaian dalam lingkungan Direktorat.

Pasal 4.

Kegiatan-kegiatan Bagian Perlengkapan dan Pengangkutan antara lain adalah :

- a. Mengawasi persediaan dan peredaran barang² pokok dan penting menurut kebijaksanaan Pemerintah.
- b. Mengusahakan agar perlengkapan akan barang² yang dibutuhkan untuk kebutuhan konsumsi dan pembangunan baik yang berasal impor maupun yang dihasilkan didalam negeri dapat dipenuhi serta merata diseluruh Indonesia.
- c. Melaksanakan penetapan alokasi, dislokasi dan pembagian barang² tersebut pada pasal ini ayat 1 sub b menurut kebijaksanaan Pemerintah.
- d. Menelaah masalah pengangkutan barang² perlengkapan yang diperlukan untuk konsumsi dan pembangunan sesuai dengan rentjana yang disiapkan, serta mengurus lain² masalah yang berhubungan dengan pengangkutan.
- e. Merentjanakan dan menetapkan angka² kebutuhan barang² pokok/penting yang diperlukan untuk konsumsi dan pembangunan.
- f. Merentjanakan peraturan² tentang penjaluran barang-barang.

Pasal 5.

Kegiatan-kegiatan Bagian Perkembangan Perdagangan/Perdagangan Antar Pulau/Pengumpulan antara lain adalah :

- a. Memperhatikan, memperkembangkan, memberi penerangan, bimbingan dan bantuan kepada aparat perdagangan untuk mempertinggi derajat usahanya sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.
- b. Mengatur dan mengawasi Perdagangan Antar Pulau baik untuk konsumsi maupun untuk produksi sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.
- c. Mengusahakan dan menelaah perdagangan pengumpulan untuk dapat dikanalisis keaparat² perdagangan ekspor terutama mengenai hasil² bumi dan lain² sebagainya.
- d. Merentjanakan peraturan tentang soal² tersebut diatas.

Pasal 6.

Kegiatan-kegiatan Bagian Penjaluran Perusahaan antara lain adalah :

Melaksanakan Penjaluran Perusahaan² Perdagangan pada umumnja dan perusahaan Asing pada khususnja untuk dapat mengadakan penjusunan dalam struktur aparat perdagangan dalam negeri, mendaftarkan permohonan perdagangan dan gudang² yang menjimpan barang² perdagangan.

Pasal 7.

Kegiatan-kegiatan Bagian Organisasi Perdagangan antara lain adalah :

(Bersambung ke hal. 32).

SUSUNAN ORGANISASI B.P.U. - NIAGA.

KEPUTUSAN KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI
NO. 044/5/MPLN/SK/65 TAHUN 1965

KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

MENIMBANG :

1. Bahwa dengan telah diadakannya re-Organisasi dibidang perdagangan, maka untuk melantarkan pelaksanaan tugas BPU-NIAGA, perlu menyesuaikan susunan organisasi BPU-NIAGA dengan tugas² jang dihadapi;
2. Bahwa berhubung dengan itu, perlu ditetapkan kembali susunan organisasi BPU-NIAGA.

MENINGAT :

1. Undang-Undang No. 19 Prp. tahun 1960;
2. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1961;
3. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1964;
4. Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1964;
5. Keputusan Presiden R.I. No. 40 tahun 1965.

MENDENGAR :

Presiden Direktur BPU-NIAGA.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

SUSUNAN ORGANISASI BPU-NIAGA SEBAGAI BERIKUT :

B A B I

U M U M

Pasal 1

P E N G E R T I A N

Jang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dengan :

- a. BPU-NIAGA ialah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Niaga Negara jang dahulu B.P.U.-P.D.N. sebagaimana jang telah didirikan dengan peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1961;
- b. Presiden Direktur ialah Presiden Direktur BPU-NIAGA;
- c. P.N. ialah Perusahaan² Negara jang ditundjuk Menteri Perdagangan Dalam Negeri untuk ber-naung dibawah BPU-NIAGA.

Pasal 2

K E D U D U K A N

BPU-NIAGA setjara organisasi/administratif berada dalam lingkungan Departemen Perdagangan Dalam Negeri dan setjara taktis/fungsional kegiatan perdagangan internasionalnja berada dalam lingkungan Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 3

T U G A S P O K O K

Dengan tidak mengurangi ketentuan² jang terdapat didalam Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1961, maka tugas pokok BPU-NIAGA ialah mengadakan koordinasi, pengawasan dan evaluasi seluruh kegiatan PN.² dan Perusahaan² lain baik didalam maupun diluar negeri jang akan ditetapkan kemudian oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi BPU-NIAGA adalah sebagai berikut :

1. Presiden Direktur;
2. Direktur Keuangan;
3. Direktur Perdagangan;
4. Direktur Perusahaan-perusahaan diluar negeri;
5. Biro Keuangan;
6. Biro Organisasi/Personalia/Perkembangan usaha/ha/Statistik;
7. Biro Ekspor;
8. Biro Impor;
9. Biro Distribusi;
10. Staf Direksi;
11. Tata-Usaha.

B A B III

PEMBAGIAN TUGAS ANGGAUTA DIREKSI

Pasal 5

1. Presiden Direktur bertugas menetapkan kebijaksanaan umum dan perentjanaan serta membawahi langsung Biro Organisasi/Personalia/Perkembangan Usaha/Statistik dengan dibantu oleh Staf Direksi dan Tata-Usaha;
2. Direktur Keuangan bertugas dibidang keuangan dan membawahi langsung Biro Keuangan;
3. Direktur Perdagangan bertugas dalam bidang Perdagangan Internasional/Perdagangan Dalam Negeri dan membawahi langsung Biro Ekspor/Biro Impor dan Biro Distribusi;
4. Direktur Perusahaan² diluar negeri bertugas mengawasi kelantjaran kegiatan Perusahaan Niaga Negara di Luar Negeri.

B A B IV

KETENTUAN² PENUTUP

Pasal 6

Tata tjara kerdja serta hal² lain jang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Presiden Direktur.

Pasal 7

Apabila ternyata terdapat kekeliruan, Surat Keputusan ini dapat diubah/ditambah.

Pasal 8

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 1 Mei 1965.

MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
KUASA MENTERI PERDAGANGAN
LUAR NEGERI

ttt.

A. JUSUF

(Brig. Djendral T.N.I.).

REORGANISASI 'P.T. KAPOK INDONESIA'

KEPUTUSAN KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

No. 050/5/MPLN/SK/65 Tahun 1965

KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

ENIMBANG :

Bahwa P.T. Kapok Indonesia adalah milik Negara sepenuhnya yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertama No. 584/MP/1960 dikuasai oleh Menteri Perdagangan;

bahwa P.T. Kapok Indonesia perlu meneruskan tugasnya sebagai single buyer dan single seller dari kapok yang dihasilkan didalam Negeri;

bahwa berhubung dengan habisnya masa jabatan :

1. Sdr. R. Soekarmen Hadimintardjo — Presiden Direktur P.T. Kapok Indonesia, pada tgl. 31 Djuli 1963, yang kemudian diperpanjang sampai 31 Djuli 1964 dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 63/M/SK/64 tertanggal 10 Maret 1964, kemudian diperpanjang lagi sampai ada ketentuan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan tgl. 7 September 1964 No. 266/M/SK/64;
2. Sdr. Ramelan — Direktur P.T. Kapok Indonesia, pada tgl. 31 Djuli 1964, kemudian diperpanjang sampai ada ketentuan lebih lanjut, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan tertanggal 7 September 1964 No. 266/M/SK/64.

bahwa dianggap perlu mengangkat anggauta² Direksi P.T. Kapok Indonesia dari pedjabat² yang faham dan menguasai persoalan P.T. Kapok Indonesia.

ENGINGAT :

Anggaran Dasar P.T. Kapok Indonesia pasal 9 ayat 2 tentang wewenang mengangkat anggauta² Direksi P.T. Kapok Indonesia.

Surat Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 18 Desember 1957 No. 5252/M dan 5253/M dan 18 Nopember 1963 No. 663/M/SK/63;

- c. Surat Keputusan Menteri Perdagangan tertanggal 23 Mei 1960 No. 3430/M dan tanggal 21 Djuli 1961 No. 2756/M.
- d. Surat Keputusan Menteri Perdagangan tertanggal 7 September 1964 No. 244/M/SK/64.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Pertama :

Terhitung mulai tanggal 15 Mei 1965 membebaskan :

1. R. Soekarmen Hadimintardjo — Presiden Direktur;
2. Ramelan — Direktur dari tugasnya pada P.T. Kapok Indonesia, dengan menyatakan banjak terima kasih atas djasa-djasannya selama mendjabat pada P.T. Kapok Indonesia tersebut;

Kedua :

Terhitung mulai tanggal 15 Mei 1965 mengangkat :

1. Soekardi Djacaria — Kepala .T.P. Kapok Indonesia Tjabang Djawa Tengah;
2. R. Sajitman — Asisten Direksi P.T. Kapok Indonesia, masing² sebagai Pd. Presiden Direktur dan Pd. Direktur P.T. Kapok Indonesia.

Ketiga :

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 11 Mei 1965.

MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

t.t.d.

A. JUSUF

Brig. Djen. T.N.I.

SERAH TERIMA PIMPINAN P. T. KAPOK.

Sesuai dengan surat keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri Brig. Djen. A. Jusuf, Senen pagi di Gedung Tri Bhakti Djakarta, telah dilangsungkan serah-terima jabatan Presiden Direktur dan Direktur P.T. Kapok.

R. Sukarmen Hadimintardjo, Presiden Direktur P.T. Kapok jang lama, telah menjerah-terimakan jabatannja pada Sukardi Zakaria dan R. Rameilan, direktur P.T. Kapok jang lama, digantikan oleh R. Sajitman.

Pada kesempatan ini, Pembantu Utama Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri/Menteri Perdagangan Dalam Negeri Soediro M.A. sekaligus telah melantik Sukardi Zakaria sebagai Pedjabat Presiden Direktur dan R. Sajitman sebagai Pedjabat Direktur P.T. Kapok jang baru.

Surat keputusan Menteri Perdagangan jang mulai berlaku tanggal 11 Mei 1965, telah membebaskan Presiden Direktur dan Direktur P.T. Kapok jang lama dari tugas-tugas mereka disertai utjapan terima kasih atas djasa-djasa mereka dan mengangkat petugas-petugas baru seperti disebut diatas.

Pergantian pimpinan ini dilakukan dalam rangka reorganisasi dan peremadjaan dalam bidang perdagangan untuk mempertinggi ketahanan revolusi.

Pembantu Utama Menteri Soediro M.A., dalam kata sambutannja mengatakan bahwa kita harus mengadakan konsolidasi dan memperkuat ketahanan revolusi jang berada dalam usaha penjeicsaian, khususnya dibidang ekonomi.

"Kaum imperialis dan nekolim berusaha memukul kita dibidang ekonomi, karena itu kita harus waspada betul", demikian Pembantu Utama Menteri.

Beliau selandjutnja mengatakan bahwa kedudukan P.T. Kapok sebagai "single buyer" dan "Single Seller" dari kapok di Indonesia adalah suatu kedudukan jang istimewa. Tetapi kalau P.T. Kapok tak dapat memenuhi target jang ditentukan pemerintah (3000 ton), maka pemerintah tak akan ragu-ragu untuk merubah status ini.

Kita harus berpegang teguh pada "amanat Berdikari" presiden Sukarno dimana dikatakan bahwa soal ekonomi adalah soal "orientasi, adjustment

pada circumstances". P.T. Kapok harus dapat berdiri diatas kaki sendiri dan dalam meng "handle" persoalan-persoalan harus selalu bersandar pada kenyataan.

Pembantu Utama Menteri selandjutnja mengatakan bahwa P.T. Kapok harus djuga mengadatkan usaha-usaha kearah "export promotion" dengan djalan mengadakan research.

Achirnja beliau mengatakan bahwa tugas jang dipikul oleh pimpinan baru adalah berat tetapi mulia. Mulia dalam arti membantu negara menambah devizen.

Pada peristiwa ini hadir pula anggauta direks B.P.U. Niaga Sumardi Mangunkusumo S.H., Wakil dari G.P.E.I.S. Ismoe Siswanto dan pimpinan pimpinan tjabang-tjabang dan perwakilan-perwakilan P.T. Kapok. Seperti diketahui P.T. Kapok mempunyai pusat dan tjabang di Semarang, tjabang di Surabaya, tjabang Djateng dan Djatir, perwakilan di Tegal, perwakilan di Djakarta dan perwakilan di Makassar.

Kapok Indonesia mempunyai mutu jang terbaik diseluruh dunia dan sebelum perang dunia ke I pernah meliputi 85% dari export dunia. Sebagai besar pohon kapok ditebang dalam masa pendudukan Djepang (= lebih kurang 75%), hal man sangat mempengaruhi djumlah produksi kapok di Indonesia. Pada saat ini Siam merupakan penghasil kapok jang utama bagi pasaran dunia (2/3 bagian dari keseluruhan kebutuhan pasar dunia sedangkan Indonesia paling tinggi menghasilkan 2000 ton dari 30 ribu ton kebutuhan dunia. Pembeli-pembeli kapok jang utama adalah Amerika Serikat, Eropa Barat dan Australia. Pemerintah bersama-sama dengan P.T. Kapok sedang mengusahakan peremadjaan dan penambahan areal tanaman kapok.

Menurut Pedjabat Presiden Direktur P.T. Kapok jang baru, Sukardi Zakaria, kapok adalah satu-satunja bahan lemah jang didjadikan "pilot project" oleh pemerintah untuk di "handle" oleh satu pembeli. Sebelumnja kapok adalah bahan spekulasi dari pedagang² liar, demikian Sukardi Zakaria.

Djakarta, 17 Mei 1965.

Sambungan hlm. 29

Melaksanakan tugas² dalam memperkembangkan, memperhatikan dan memberikan penerangan dan bimbingan kepada Organisasi Perdagangan, OPS/GPS serta melaksanakan kegiatan-kegiatan taktis-operasionil sebagaimana dimaksud dalam peraturan Presiden No. 2 tahun 1965 tentang peraturan pokok Organisasi Perusahaan Sedjenis.

Pasal 8.

Kepala Direktorat Pengadaan dan Penjaluran memberi instruksi²/petunjuk² jang bersifat tehnis
Tjatakan Red.: Bagan Organisasi Direktorat Pengadaan dan Penjaluran, lihat Warta Perdagangan no. 4.

dan administratif kepada Kepala Kantor² Perwakilan Perdagangan di Daerah².

Pasal 9.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 24 April 1965.

MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

ttd.

A. JUSUF

(Brig. Djendral T.N.I.).

BADAN-BADAN PENGAWAS DAN DIREKSI „P.T. PEKSIN”

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 1965 tertanggal 5 Mei 1965, maka Susunan Badan-Badan Pengawas dari "P.T. Peksin" yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 Tahun 1964 tertanggal 11 Desember 1964, mengalami perubahan.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 1965 tertanggal 5 Mei 1965 ditetapkan terhitung mulai tanggal 24 April :

Pertama : membebaskan :

- a. J.M. Menteri **Adam Malik** sebagai Ketua Badan Pengawas Harian "Peksin";
- b. J.M. Menteri Urusan Bank Sentral **Jusuf Muda Dalam** sebagai Wakil Ketua Badan Pengawas Harian "Peksin";

Kedua : mengangkat :

- a. J.M. Menteri **Koordinator Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin Adam Malik** sebagai Anggota Badan Pengawasan Tertinggi "Peksin";
 - b. **J.M. Menteri Urusan Bank Sentral Jusuf Muda Dalam** sebagai Ketua Badan Pengawas Harian "Peksin";
 - c. **J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri Brigadir Djenderal Achmad Jusuf** sebagai Wakil Ketua Badan Pengawas Harian "Peksin".
- Sehingga susunan dari Badan Pengawasan dan Direksi Peksin yang telah disesuaikan dengan perubahan penambahan dalam Kabinet Dwikora adalah sbb. :

I. Pengawas/Penasehat Agung — Presiden Republik Indonesia Sukarno.

I. Badan Pengawas Tertinggi

Ketua	— Wakil Perdana Menteri I Dr. Subandrio.
Wakil Ketua	— Wakil Perdana Menteri III Dr. Chaerul Saleh.
Anggota	— Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan Sumarno S.H.
Anggota	— Menteri Koordinator Urusan Perentjanaan dan Pembangunan Nasional Dr. Suharto.
Anggota	— Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Hadji Mohamad Hassan.
Anggota	— Menteri Perhubungan Laut Major Djenderal KKO. Ali Sadikin
Anggota	— Menteri Perkebunan Drs. Frans Seda.
Anggota	— Menteri Transmigrasi dan Koperasi Drs. Achadi.
Anggota	— Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri Urusan Funds & Forces Notohamiprodo.
Anggota	— Menteri Koordinator Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin Adam Malik.

Badan Pengawas Harian

Ketua	— Menteri Urusan Bank Sentral Jusuf Muda Dalam
Wakil Ketua	— Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri Brigadir Djenderal Achmad Jusuf.

Mewakili Wakil Ketua) dan merangkap Ang-
gota Utusan)

Anggota	— Menteri Negara Arifin Harahap S.H.
Anggota	— Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta J.D. Massie.
Anggota	— Presiden Direktur Bank Umum Negara Andi Faisal.
Anggota	— Presiden Direktur Bank Koperasi, Tani & Nelajan Brigadir Djenderal Suhardi.
Anggota	— Presiden Direktur Bank Negara Indonesia Potan Arif Harahap S.H.

Direksi
Presiden Direktur
Direktur
Direktur

- **T.A.H. Azwar.**
- **Mohamad Jusuf.**
- **Kolonel Jusuf Ramli.**

HAK COUNTER-IMPOR BAGI EKSPORTIR DASWATI¹ I SUMATRA JANG MENGEKSPOR BARANG² TERTENTU KEPELABUHAN BEBAS SABANG

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI URUSAN BANK SENTRAL DAN MENTERI PERDAGANGAN/KUASA MENTERI URUSAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

No. Kep. 38/UBS/65

MENTERI URUSAN BANK SENTRAL DAN MENTERI PERDAGANGAN/KUASA MENTERI URUSAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

- MENIMBANG :**
1. bahwa, dalam rangka men-sukseskan perjuangannya mengganjang apa jang dinamakan Negara Malaysia, perlu pelabuhan bebas Sabang diperkembangkan mendjadi kesatuan ekonomi jang dapat mengimbangi pelabuhan Penang atau Singapore;
 2. bahwa, berhubung dengan itu perlu adanya insentip jang lajak terhadap ekspor ke pelabuhan bebas Sabang;
- MENGINGAT :**
- a. Perpres No. 22 tahun 1964;
 - b. Perpres No. 23 tahun 1964;
 - c. Penetapan Wangser I KOTOE No. Pen. 01/1964;
 - d. Penetapan Wangser I KOTOE No. Pen. 02/1964;
 - e. Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia No. 67/UBS/64 tanggal 11 Nopember 1964;
 - f. Keputusan Bersama Menteri Urusan Bank Sentral, Menteri Perdagangan dan Menteri Urusan Pendapatan Pembiajaan dan Pengawasan No. 68/UBS/64, tanggal 12 Nopember 1964;
 - g. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 tahun 1964;
 - h. Undang-undang lalu-lintas Devisa No. 32 tahun 1964.

MEMUTUSKAN :

Mendahului Keputusan dari Dewan Lalu Lintas Devisa,

MENETAPKAN :

- Pertama :** untuk ekspor hasil² bumi/barang² tertentu a.l. jang tidak dapat disortir/diolah mendjadi mutu standard dan merupakan surplus, dari pelabuhan² Daswati² I Kepulauan Sumatra dengan tudjuan Sabang untuk diproses dan di-reekspor, diberikan hak counter-import kepada eksportir sebesar 30% dari hasil ekspor;
- Kedua :** Djenis hasil bumi/barang² dimaksud pada Pertama ditetapkan oleh Direktorat Ekspor;
- Ketiga :** Atas ekspor dimaksud pada Pertama tersebut diatas tidak lagi diberikan hak S.P.P. sebesar 20%/30% atau A.D. sebesar 5%;
- Ke-empat :** Hak counter-impor dalam Pertama tidak dapat dipindahtanggankan kepada eksportir/impor lainnja dan harus segera dipergunakan setelah barang²/hasil bumi ekspor sampai ditangan pembeli di Sabang;
- Kelima :** Hak counter-import hanja dapat dipergunakan untuk impor barang² kedaerah asal;
- Ke-enam :** Djenis barang² impor ditetapkan oleh Direktorat Impor;
- Ketudjuh :** Peraturan pelaksanaan dari Surat Keputusan ini ditetapkan oleh masing-masing Direktorat Ekspor, Direktorat Impor dan Biro Lalu Lintas Devisa;
- Kedelapan :** Surat Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan;
- Agar diketahui oleh umum memerintahkan pengundangan Surat Keputusan ini dalam Lembaran Negara R.I.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Mei 1965.

MENKO KOMPARTIMEN LUAR NEGERI/HUBUNGAN EKONOMI
LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

u.b.

MENTERI URUSAN
BANK SENTRAL

KUASA MENTERI URUSAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

ttd.

ttd.

(Jusuf Muda Dalam)

(A. JUSUF).
Brig. Djendral T.N.I.

KETENTUAN PELAKSANAAN DJENIS BARANG² JANG DIIMPOR ATAS DASAR COUNTER IMPOR DARI HASIL EKSPOR KE SABANG

KEPUTUSAN KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI No. 057/5/MPLN/SK/65

KUASA MENTERI PERDAGANGAN
LUAR NEGERI,

dagangan Luar Negeri No. Kep. 38/UBS/65 tang-
gal 8 Mei 1965.

MENIMBANG :

Bahwa berhubung dengan diadakannya peraturan ekspor dari daerah pabean Indonesia kedalam wilayah Sabang atas dasar Letter of Credit (L/C) dengan counter-impor 30% dari hasil ekspor, maka perlu diadakan ketentuan mengenai djenis golongan barang² jang dapat diimpor ke-daerah pabean Indonesia.

Pertama :

Barang² jang dapat diimpor atas dasar counter-impor ini adalah barang² jang termasuk dalam lampiran Peraturan Pelaksanaan Direktorat Impor tgl. 17 Mei 1965 No. 246/Kep. Dim/65 dan tgl. 18 Mei 1965 No. 252/Kep. Dim/65. *)

MENINGAT :

Surat Keputusan Menko Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri & Perdagangan Luar Negeri No. 001/03/MPLN/SK/65 tgl. 15 Maret 1965.

Kedua :

Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 31 Mei 1965.

MEMUTUSKAN :

KUASA MENTERI PERDAGANGAN
LUAR NEGERI,

MENETAPKAN :

Ketentuan² mengenai pelaksanaan peraturan impor barang² atas dasar counter-impor 30% dari hasil ekspor seperti dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Perdagangan/Kuasa Menteri Urusan Per-

u.b.

ttd.

SOEDIRO M.A.
Pembantu Utama

). Lihat Warta Perdagangan No. 2 pada halaman : 31, 32 dan 35.

PIMPINAN UNIT-UNIT CHUSUS JANG BERADA DIBAWAH PENGAWASAN

B.P.U. — NIAGA

N a m a :

D j a b a t a n :

- . Hari Soerahardjo S.H. — sebagai Pd. Pres. Dir. Unit "KARYA TJOTAS"
- . R. Ardjanoe — sebagai Pd. Pres. Dir. Unit "CATTLE PROJECT" (Fadjar Ternak).
- . Ir. S. Liem Tjing Giok — sebagai Pd. Pres. Dir. Unit PENGOLAHAN & PABRIK TJAT "UTAMA".
- . Soetopo — sebagai Pd. Pres. Dir. Unit "MEGA ELECTRO".
- . Ir. Santoso — sebagai Pd. Pres. Dir. Unit ASSEMBLING MOBIL bekas Divisi VII P.N. Tulus Bhakti.
- . W.T. Siregar — sebagai Pd. Pres. Dir. Unit TOKO² BUKU bekas P.N. Fadjar Bhakti.

TOURIST-CHEQUE

Pengumuman BLLD no : 6/Inv/BLLD/65,
tgl. 15-5-'65

Seperti diketahui dengan Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia No. Kep. 11/UBS/65 tgl. 30 Djan. 1965, maka ketentuan-ketentuan yang tertantum dalam Himpunan Ketentuan-ketentuan Penjelenggaraan mengenai Devisen (H.K.P.D.) terhitung mulai tanggal 15 Pebruari 1965 telah ditjabut, sehingga ketentuan-ketentuan mengenai Tourist Cheques pada Bab. 4.8. dari H.K.P.D. tersebut menjadi tidak berlaku lagi.

Berhubung dengan itu maka dipandang perlu untuk memberikan pendjelasan-pendjelasan sebagai berikut :

1. Bank-Bank Devisa tidak diperkenankan lagi untuk :
 - a. mendjual Tourist-Cheque baru.
 - b. mengeluarkan Tourist-Cheque baru sebagai ganti dari Tourist-Cheque yang masa lakunja telah lampau.
2. Tourist-Cheque yang belum terdjual dan masih ada pada Bank Devisa harus dikembalikan kepada Dana Devisa selambat-lambatnja 1 (satu) bulan sesudah tanggal pengumuman ini.
3. Tourist-Cheque yang telah diterima pembajaran barang-barang atau djasa-djasa oleh Hotel-Hotel dan toko-toko serta badan-badan lain yang ditundjuk oleh L.A.A.P.L.N. dahulu, selambat-lambatnja satu bulan sesudah tanggal pengumuman ini harus dimasukkan kerekening valuta asing yang bersangkutan pada Bank Indonesia.
4. Tourist-Cheque yang masih berlaku dan belum dipergunakan oleh pemiliknja selambat-lambatnja satu bulan sesudah tanggal pengumuman ini :
 - a. untuk short-visitors maupun non short-visitors dapat dibukukan ke-rekening D.P.-A. atau ditukarkan dengan traveller's cheque.
 - b. untuk perwakilan-perwakilan negara-negara asing beserta anggota Corps Diplomatique dapat dibukukan ke-rekening valuta asing yang bersangkutan atau ditukarkan ke Rupiah atas dasar kurs US \$ 1 = Rp. 520,—
 - c. untuk warga negara dan badan-badan hukum baik Indonesia maupun asing dapat dibukukan ke-rekening D.P.-A.
5. Tourist-Cheque yang setelah masa laku 90 hari lampau yang dalam waktu satu tahun tidak pernah diperpanjang lagi hanja dapat ditukarkan ke Rupiah atas dasar kurs US \$ 1 = Rp. 520,—

6 Untuk djelasnja diberitahukan, bahwa warga negara Indonesia yang memiliki valuta asing dalam rekening D.P.-A atau valuta asing lainnja (misalnja : traveller's dsb) yang tidak wajib diserahkan kepada Dana Devisa dapat melakukan pembajaran kepada P.T. HOTEL INDONESIA, P.T. Departement Store SARI NAH dan badan-badan lain yang dahulu diperkenankan menerima Tourist-Cheque dengan penjetoran kerekening valuta asing badan yang termaksud diatas atau dengan menjerahkan valuta asing lainnja itu.

PIMPINAN
BIRO LALU LINTAS DEvisa
DIREKTORIUM,

R.A. Kartadjoemena. Martojo Koentoro

PENETAPAN HARGA PENJERAHAN

BARANG² EKSPOR GOL. I

NO. 29/HP/65.

Berlaku dari tgl. 31 Mei s/d 5 Djuni 1965

KARET PER POUND

RSS. I	US. \$.	sen 21 1/2
RSS. II	US. \$.	sen 20 7/8
RSS. III	US. \$.	sen 19 1/2
RSS. IV	US. \$.	sen 17 3/4
RSS. V	US. \$.	sen 14 1/2
THIN PALE CREPE I	US. \$.	sen 20 3/4
THIN PALE CREPE II	US. \$.	sen 19 5/8
THIN PALE CREPE III	US. \$.	sen 18 1/2
BROWN 1 X	US. \$.	sen 15 1/2
BROWN 2 X	US. \$.	sen 14 1/2
BROWN 3 X	US. \$.	sen 12 5/8
BLANKET C	US. \$.	sen 11 3/4
BLANKET D	US. \$.	sen 10 1/2
REMILLED 3	US. \$.	sen 11 3/4
REMILLED 4	US. \$.	sen 10 1/2
FLATBARK CREPE	US. \$.	sen 7 1/2
CUTTINGS A	US. \$.	sen 18 1/2
CUTTINGS B	US. \$.	sen 16 1/2
CUTTINGS C	US. \$.	sen 13 7/8
SMOKED BLANKET I	US. \$.	sen 13 1/2
SMOKED BLANKET II	US. \$.	sen 12 1/2

Djakarta, 29 Mei 1965.

PIMPINAN
BIRO LALU LINTAS DEvisa
DIREKTORIUM

ttt.

R.A. Kartadjoemena

Ketua

"RE-EXCHANGE" SISA RUPIAH EX PENDJUALAN VALUTA ASING DIPERHITUNGKAN DENGAN REKENING DP-B BANK

Pengumuman Biro Lalu Lintas Devisa
No. 4/DP/BLLD/65 Tgl. 17 Mei 1965.

Menunjuk kepada Pengumuman kami tertanggal 20 Pebruari 1965 No. 1/DP/BLLD/65, bersama ini ditetapkan, bahwa kepada short-visitors yang meninggalkan Indonesia diberi kemungkinan untuk melakukan "re-exchange" sisa rupiahnya yang berasal dari pendjualan valuta asing pada bank divisa dengan memperhatikan ketentuan² sebagai berikut :

1. Dengan short-visitors dimaksudkan pengundjung² yang memiliki visa yang tidak melebihi 3 (tiga) bulan.
2. Short-visitors yang hendak meninggalkan Indonesia dapat menukar kembali sisa rupiahnya yang berasal dari pendjualan valuta asing pada suatu bank divisa sampai sejumlah 10% (sepuluh perseratus) dari valuta yang telah ditukarkannya dengan maksimum US. \$. 50.— (atau nilai lawannya dalam valuta asing lain) dengan harga pendjualan Devisa Pelengkap yang berlaku pada tanggal "Re-exchange" termaksud diatas.
3. Re-exchange dimaksud hanya dapat dilakukan pada Bank Devisa di pelabuhan dari mana short-visitors yang bersangkutan akan berangkat keluar negeri (port of embarkation).

Misalnja untuk Djakarta di Kemajoran dan Tandjung Priok. Short-visitor yang bersangkutan harus menundjukkan pada bank divisa :

- a. nota-bank yang terdahulu sewaktu dilakukan penukaran dari valuta asing ke Rupiah,
 - b. ticket alat pengangkutan dan
 - c. paspor.
4. Pendjualan valuta (re-exchange) termaksud diatas oleh bank ditjatat pada nota (pendjualan) bank termaksud pada sub 3 a.
 5. Pendjualan valuta dimaksud pada ayat 4 ini dibebaskan dari pungutan retribusi untuk B.L.L.D. dan pungutan² lain.
 6. Re-exchange termaksud diatas dapat dilakukan mulai tanggal pengumuman ini.

Djumlah valuta asing yang berasal dari Re-exchange yang dimaksudkan dalam Pengumuman ini diperkenankan dibawa ke Luar Negeri tanpa izin khusus dari Biro, sepanjang valuta asing semuanja yang akan dibawa oleh pengundjung² tidak melebihi djumlah² sebagaimana No. 4/Inv/BLLD/65 Bagian II sub 2, 3 dan 4.

PIMPINAN
BIRO LALU LINTAS DEvisa
DIRECTORIUM,

R.A. Kartadjoemena. A.A. Harahap

MASALAH PERENTJANAAN..... (Sambungan hal. 19)

danja pengaruh berantai (total backward and forward leakage effects) jaitu dengan mendirikan proyek tersebut akan timbul akibat² otomatis yang menjerabkan aktivitas² ekonomi yang serentak melebar esegala bidang dan hal ini dalam istilah ekonomi dinamakan leading sector. Setelah itu diadjukan kepada pengusaha yang berwenang mengambil keputusan dalam menetapkan planning itu diterima atau tidak. Suatu planning yang telah dibuat tidak dengan andirinja akan segera dapat diterima dan dilaksanakan, hal ini akan tergantung pada persoalan apakah planning itu dibuat dan dilaksanakan oleh suatu badan. Djika halnja demikian maka boleh dikatakan tidak ada persoalan. Tetapi kebanyakan planning dibuat oleh suatu Badan tersendiri dan dilaksanakan

oleh Badan² lain. Seperti di Indonesia rentjana yang bersifat Nasional, dibuat oleh Badan Eksekutif dari Pemerintah, jaitu Bappenas dan kemudian harus mendapat pengesjahan dari M.P.R.S.. Dalam hal ini timbul persoalan :

- * Bagaimana usaha atau siasat planner agar supaya planning yang telah dibuatnja dapat diterima.
- * Suatu tjara yang dapat disarankan, jaitu anggota dari badan berwenang turut mengambil keputusan dalam hal ini turut serta didalam penjusunan planning yang bersangkutan, sehingga planning yang telah disusun itu sebagian besar sudah mendapat dukungan dari anggota² yang duduk didalam Badan tersebut.

LIST OF G. P. E. I. S. BRANCHES

D J A K A R T A :

ADDRESS : Djl. Kramat Raya 4-6 (atas), Djakarta.

EXPORT COMMODITIES : rubber, copra, coffee, tea, sugar, tapioka flour, copra chips and cakes, fruits, vegetables, pearl and seeds, nutmegs and mace, pepper, arrack, cinchona bark, cananga oil, citronella oil, gutta percha, teakwood, wood carving, hides of goats, hides of iguanas, hides of snakes, hides of crocodiles, sheep's wool, arenga-palm fibres, batticks, handwoven materials and cloths, bambu hats, pandan hats, animals live, shells, birds'nests (edible), cattlebones, hoofs, plants (living), arecanuts, kumis kucing, temulawak, damar, pandan mats, seaweed, etc. etc.

T J I R E B O N :

ADDRESS : Djl. Kantor no. 16, Tjirebon.

EXPORT COMMODITIES : pepper, tea, tapioca flour, maize, tamarind, vegetables, onions, paprika, arrack, byproducts of rice (rice flour and rice bran), copra chips and cakes, groundnuts, sesamun seeds, groundnuts oil, cattlebones, seeds of agriculture and forestry, arecanuts, cassia fistula, cinchona bark, cubeb, pandan mats, work of plaiting material etc. etc.

S E M A R A N G :

ADDRESSES : Djl. Mataram No. 673, Semarang.

EXPORT COMMODITIES : rubber, tobacco, coffee, tea, tapioca flour, gapek flour, fruits, vegetables, cocoa beans, nutmegs and mace, pepper, vanilla, copra chips and cakes, tapioca refuse, groundnuts, capoc and capoc seeds, sesamun seeds, groundnuts oil, citronella oil, teakwood, wood carving, hides of buffaloes, hides of goats, hides of sheeps, hides of iguanas, sheep's wool, arenga-palm fibres, animals live, birds nests (edible), cattlebones, seeds of agriculture and forestry, cinchona bark, cubeb, kumis kucing, temulawak, pandan mats and matting, sugar, arrack, tamarind, paprika etc. etc.

S U R A B A J A :

ADDRESS : Djl. Djembatan Merah 15, Surabaja.

EXPORT COMMODITIES : rubber, tobacco, coffee, tea, gapek and gapek flour, nutmegs and mace, copra chips and cakes, sugar, tripang, maize, tamarind, cocoa, piper longum, paprika, rice flour and rice bran, groundnuts, capoc and capoc seeds, sesamun seeds, teakwood, junglewood, wood carving, hides of goats, hides of sheep, hides of iguanas, hides of crocodiles, leather work, agave fibres, animals live, shells, troca or lola, birds'nests (edible), cattlebones, seeds of agriculture and forestry, arecanuts, sandalwood, cinchona bark, temulawak, rattan, pandan mats and matting, seaweed, etc. etc.

LIST OF G.P.E.I.S. BRANCHES

KUTARADJA :

ADDRESS : Djl. Perdagangan Tingkat I, Kutaradja.

EXPORT COMMODITIES : rubber, coffee, tea, copra, tobacco, pepper, cinamon cassia, nutmegs and mace, paprika, rice flour and rice bran, tanning extracts (gambir), patchouli oil, arenga-palm fibres, troca or lola, arecanuts, cubeb, benzoin, buffaloes, copra chips and cakes, palmoil, palm kernels, dragon's blood, damar, rattan, groundnuts, soya beans, hides of cattle, hides of iguanas, pandan mats, ets. etc.

MEDAN :

ADDRESS : Djl. Hindu No. 10/Atas, Medan.

EXPORT COMMODITIES : rubber, tobacco, fruits, potatoes, vegetables, coffee, tea, cinamon-cassia, nutmegs and mace, pepper, copra chips and cakes, palmoil, palmkernels, terpentyn oil, cananga oil, patchouli oil, hard cordage-fibres, agave, arecanuts, damar, derris roots, fishes, shells, affal of crustacean and other melluses, etc. etc.

SIBOLGA :

ADDRESS : Djl. Perniagaan no. 18/Atas, Sibolga.

EXPORT COMMODITIES : rubber, coffee, copra, nutmegs and mace, cinamon cassia, birds nets (edible), troca or lola, tortoise shell, damar, rattan, etc. etc.

PADANG :

ADDRESS : D/A N.V. Dj. Kali Pemali no. 14, Padang.

EXPORT COMMODITIES : rubber, coffee, tea, tobacco, cinamon cassia, nutmegs and mace, copra chips and cakes, gambir, rattan, etc. etc.

PAKANBARU :

ADDRESS : D/A N.V. Sabco Djl. Djawa/Musalla Pakanbaru.

EXPORT COMMODITIES : rubber, copra, tobacco, copra chips and cakes, junglewood, fishes, fertilizers (affal of crustacean and other melluses), sago, firewood, charcoal, rattan, jelutong, arecanuts, shells, riceflour and ricebran, work of plaiting material, rattan, plain leaf thatch and plaited bamboo mats, etc. etc.

DJAMBI :

ADDRESS : Djl. Sultan Toha 155, Djambi.

EXPORT COMMODITIES : rubber, copra, gutta percha, hides of crocodiles, dragon's blood, rattan, jelutong, etc. etc.

PALEMBANG :

ADDRESS : Djl. Karet d/a N.V. Karet, Djl. Sudirman, Palembang.

EXPORT COMMODITIES : rubber, coffee, tea, pepper, copra chips and cakes, wax of bees and other insects, jelutong, hides of crocodiles, damar, rattan, etc. etc.

TELOKBETONG :

ADDRESS : Djl. Banda No. 11, Telokbetong.

EXPORT COMMODITIES : rubber, pepper, coffee, tapioca flour, copra chips and cakes, palm kernels, palmoil, damar, wax of bees and other insects, etc. etc.

LIST OF G.P.E.I.S. BRANCHES

PONTIANAK :

ADDRESS : d/a N.V. Tri Saka Djl. Sarodja No. 6, Pontianak,

EXPORT COMMODITIES : tengkawang kernels, rubber, pepper, jelutong, gutta percha, damar, rattan, junglewood, hides of crocodiles, hides of iguanas, birds'nests (edible), etc. etc.

BANDJARMASIN :

ADDRESS : Djl. Niaga Timur 68, Bandjarmasin.

EXPORT COMMODITIES : rubber, damar, rattan, tripang, gutta percha, hides of iguanas, hides of snakes, hides of crocodiles, birds'nests (edible), tortoise shell, horns of deer, pandan mats and matting, jelutong, woods, hangkang, ketiaw, etc. etc.

SAMARINDA :

ADDRESS : Djl. Pelabuhan Pt/8, Samarinda.

EXPORT COMMODITIES : rubber, shells, wax of bees and other insects, hides of iguanas, hides of snakes, hides of crocodiles, birds'nests (edible), bakau-bark, bakauwood, copal melengket, damar, rattan, troca or lola, tortoise shell, jelutong, junglewood, garroo wood, etc. etc.

MAKASSAR :

ADDRESS : Djl. Sulawesi No. 69, Makassar.

EXPORT COMMODITIES : copra, rubber, coffee, nutmegs and mace, copra chips and cakes, groundnuts, capoc seeds, tripang, sesamun-seeds, ebonywood, hides of buffaloes, hides of snakes, hides of crocodiles, shells, mother of pearl, troca or lola, hoofs, horns of buffalo, horns of deer, tortoise shell, arecanuts, cacia fistula, copal, loba, rattan, seaweed, etc. etc.

MENADO :

ADDRESS : Djl. Roda no. 10, Manado.

EXPORT COMMODITIES : copra, nutmegs, mace, etc. etc.

DENPASAR :

ADDRESS : Djl. Sriwidjaja Atas, Denpasar.

EXPORT COMMODITIES : buffalo, cattle, swine, coffee, tamarind, wood carving, etc. etc.

AMPENAN :

ADDRESS : Djl. Saleh Sungkar no. 24, Ampenan.

EXPORT COMMODITIES : tobacco, coffee, groundnuts, soya beans, kemiri nuts, swine, buffalo, cattle, tamarind, copra chips and cakes, wood carving, etc. etc.

AMBON :

ADDRESS : Djl. Batumedja No. 17, Ambon.

EXPORT COMMODITIES : nutmegs, mace, damar, copra, woods, tripang, troca or lola, affal of crustacean and other melluses, seaweed, caju puti oil, gom copal etc. etc.

PANGKALPINANG :

ADDRESS : d/a P.N. Aduma Niaga Djl. Rangkui No. 10, Pangkalpinang,



OMEGA SERVICE STATION PN PANTJA NIAGA DJALAN NARIPAN No 23 BANDUNG

Hanja satu perwakilan

Omega jang resmi

Dapat memberikan servise

Pada sebuah arlodji Omega

sebab tidak seorangpun dapat

mendjamin hari depannja

Dika anda ingin memilih sebuah arlodji jang bagus, hanja ada satu djalan untuk mendapatkan nilai penuh bagi uang anda

itu adalah-membeli satu Omega.

Karena setelah itu anda akan mendapat djaminan bahwa ia selalu akan mendapat perhatian oleh satu perwakilan Omega jang resmi selama anda memilikinja

Pantja Niaga adalah wakil resmi dari arlodji² Omega di Indonesia. Sebab selaku perusahaan Swiss jang termasukjhur, Omega, selalu merasa bertanggung djawab bagi kebaikan arlodji anda, lama setelah anda membelinja

Pada Omega Servise Station jang dimilikii Pantja Niaga di Bandung, kami menyediakan semua perlengkapan dan onderdil² asli dari Omega untuk perbaikan dan pemeliharaan dari arlodji Omega. Seorang ahli arlodji bangsa Swiss jang terlatih dari paberik memimpin Servise Station ini, bekerdja dengan kami sampai ia selesai mengadakan segala kepandaiannya kepada staf Indonesia kami. Arlodji Swiss jang terbagus — dan arlodji jang anda dapat pertahankan kebugusannya — itulah servise Omega jang kami tawarkan kepada anda melalui Pantja Niaga

Anda ingin SUKSES dalam Perdagangan ?

Datangilah

P.N. PEMBANGUNAN NIAGA



**Aparat Revolusi dalam
bidang perdagangan :**

IMPOR

EKSPOR

KONTRAKTOR

PROJEK dan INDUSTRI

Untuk suksesnja usaha anda, harap berhubungan dengan :

P.N. PEMBANGUNAN NIAGA

Division² :

- 1. IMPOR BAHAN BANGUNAN**
- 2. IMPOR ALAT² BESAR/MESIN²**
- 3. IMPOR MESIN² SANDANG**

Alamat :

Djl. Hajam Wuruk no. 127.

D J A K A R T A

Division² :

- 1. IMPOR SANDANG PANGAN**
- 2. IMPOR BAHAN² CHEMICALIEN/PHARMASI**
- 3. E K S P O R**

Alamat :

Djl. Gadjah Mada no. 18.

D J A K A R T A

WARTA

RECEIVED

JUN 11 1966

UNIV. WISCONSIN LIBRARY



Perdagangan

AP
W299
P433
18
4



4

TAHUN KE-XVIII
8 JUNI 1965

MADJALAH MINGGUAN
„WARTA PERDAGANGAN“

Diterbitkan oleh :

Departemen Perdagangan Dalam Negeri
beserta Urusan Perdagangan Luar Negeri
dari Kompartimen Luar Negeri/H.E.L.N.
dan Perdagangan Luar Negeri.

Pelindung :

J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/
Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri
BRIG. DJENDERAL A. JUSUF.

Pemimpin Umum :

Kepala Direktorat Marketing dan Research :
Ir. J. J. Pitoy M.A. econ.

Staf Redaksi :

Staf Direktorat Marketing dan Research.

Penanggung Jawab :

Kepala Seksi Publikasi Madjalah
Anwar B. Harahap.

Pembantu Tetap :

Prof. Ir. Teko Sumodwirjo
Kolonel Jusuf Ramli
Major A. Rachman Rukmantara
R. Hertatijanto S.H.
Drs. Waskito
Dr. J. Panglaykim

Pembantu² Khusus :

Kolonel Usman Ismail
Major Drs. Sukadjat
Zahar
R. Isa
Drs. A. Aidit
Suprpto
Sudjadi
A. Karim Usman S.H.
Dudy Djaya

Alamat Redaksi dan Tata Usaha :

Madjalah „WARTA PERDAGANGAN“
Direktorat Marketing dan Research
Djalan Tanah Abang Timur No. 87
D J A K A R T A

Pelaksana/Pertjetakan :

Kepala Pertjetakan P.N. Karya Tjotas
Burdi Reksodirdjo.

Pembayaran uang langganan dilakukan dimuka dengan :

1. Penjetoran atas Rekening Madjalah
„Warta Perdagangan“ Kode No: KB/
W.A.-194, pada Bank Indonesia —
Dj: Thamrin, Djakarta.
2. Dinas Giro dan Tjek Pos atau dengan
pos wissel jang langsung dialamatkan
kepada Tata Usaha Warta Perdagangan
Direktorat Marketing dan Research.

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Kata Pengantar Redaksi	1
2. Departemen Perdagangan untuk melajani Rakjat	2
3. Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme	4
4. Djalankan Revolusi dalam tjara bekerdja ...	15
5. Kebidjaksanaan Perdagangan Luar Negeri ..	16
6. Ketentuan ² mengenai Kebidjaksanaan Pe- merintah dalam bidang perdagangan ekspor dan pembentukan team teknis ekspor	17
8. Keharusan Survey terhadap barangimpor atas beban Devisa Negara	19
9. Memperkenalkan Superintending Company of Indonesia Ltd.	20
10. Penempatan semua Perusahaan Asing jang tidak bersifat domestik dibawah penguasaan Pemerintah R.I.	26
11. Perubahan tarip biaja administrasi gudang/ ruang	28
12. Pendaftaran Perusahaan	28
13. Perkembangan harga kopi dan pengaruhnja terhadap "Coffee Export Quotas"	30
14. Sjarat-sjarat Penerbitan resmi	32
15. Penerbitan Madjalah dan berkala lainnja dari Departemen Perdagangan	33
16. Nama-nama Kepala, Wakil Kepala, Kepala Bagian, dan Kepala ² Seksi dari Direktorat ² / Sekum dalam lingkungan Departemen Per- dagangan Dalam Negeri	34
17. Djasa-Djasa (Pengumuman BLLD)	36
18. Penetapan harga penjerahan Barang ² Ekspor Golongan II	38

WARTA PERDAGANGAN NO. 5

memuat antara lain :

1. Tjara²/Prosedur impor dewasa ini.
2. Barang-barang jang dapat diimport berdasarkan
Devisa pelengkap.
3. Unit-Unit ukuran/timbangan.

Surat Izin terbit No.. 21A/SK/UPPG/SIT-19
tanggal 17-4-1965.

Sungguh bahagia Rakjat Indonesia dapat memperingati Hari Ulang Tahun ke 64 dari P.J.M. Hadji Dr Ir Sukarno sebagai Presiden/Kepala Negara Republik Indonesia, sebagai Pemimpin Besar Revolusi dan Penjambung Lidah Rakjat Indonesia jang 105 djuta hajaknja itu; berkenaan dengan peristiwa jang bahagia ini, dengan chidmat kita pandjatkan pudji sjukur dan doa kepada Tuhan Jang Maha Esa, semoga menganugerahi usia pandjang, keselamatan dan kesedjahteraan serta melimpahkan rahmat, taufik dan hidajat kepada Bung Karno untuk memimpin Rakjat Indonesia menudju pembangunan Sosialisme Indonesia ialah SOSIALISME BERDASARKAN PANTJASILA, menudju pembangunan masyarakat jang adil dan makmur materiil dan spirituul berdasarkan Pantjasila; memimpin kita untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakjat Indonesia dan Amanat Penderitaan Rakjat diseluruh Dunia menudju pembangunan dunia baru jang bebas dari penghisapan manusia atas manusia dan bebas dari penghisapan oleh bangsa atas bangsa.

Dalam nomor ini kami memuat Adjaran Pemimpin Besar Revolusi Indonesia jang telah dirumus oleh Bung Karno dalam tahun 1926 dan berdjulud "Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme" — seperti senantiasa halnja dalam madjalah ini mengenai semua Adjaran, Amanat/Pidato Bung Karno — dimuat sekaligus dalam keseluruhannja. Dalam amanatnja kepada para peserta Pendidikan Kilat Kader Nasakom pada tahun 1965 ini, oleh Presiden/Pemimpin Tertinggi Front Nasional telah diamanatkan untuk melaksanakan prinsip berdikari dalam bidang ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Tanggal 6 Djuni, Hari Kelahiran Kepala Negara kita Bung Karno, telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Hari Kanak-kanak. Pada Hari Kanak-kanak tahun ini, Bung Karno jang pernah setjara dialektis mengformulir bahwa "wie de toekomst heeft, heeft de jeugd", berkenan memberi wedjangan kepada segenap kanak-kanak bunga bangsa, penerus kehidupan bangsa, bahwa anak-anak itu harus mentjintai Tuhan Jang Maha Esa, mentjintai ibu-bapanja, mentjintai Tanahair, tjinta kepada guru, kepada kerdja, kepada keindahan, kepada keadilan. Untuk menjambut Hari Kanak-Kanak, dalam nomor ini dimuat foto reportase mengenai perajaan jang diselenggarakan oleh Keluarga Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri bertempat di Departemen Perdagangan, Djalan Tanah Abang Timur 87, Djakarta.

Bila oleh P.J.M. Presiden telah diperintahkan kepada para peserta Pendidikan Kilat Kader Nasakom untuk "Djalankan Revolusi dalam tjara bekerdja", sebagai condition sine qua non untuk dapat melaksanakan tjepat dan tepat TRISAKTI TAVIP, maka J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri Brigdjien A. Jusuf, dalam prasaran beliau didepan Musjawarah Besar Gabungan Importir Veteran Seluruh Indonesia, telah menandakan antara lain bahwa "Departemen Perdagangan adalah departemen untuk melajani kepentingan rakjat dan masyarakat pada umumnja serta memberikan "service" kepada para pengusaha dalam bidang perdagangan pada chususnja, sedangkan para petugasnja tidak boleh membuat dirinja mendjadi "untouchable" dengan menggunakan birokrasi sebagai alat"

Departemen Perdagangan untuk Melajani Rakjat

Dalam melaksanakan tugas, kita terutama harus melihat pada tudjuan dan tidak usah a priori sudah terikat pada peraturan-peraturan dan tata-tjara kerdja jang birokratis. Demikianlah ditan-daskan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri/ Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri Brigdjen A. Jusuf didepan Musjawarah Besar Gabu- ngan Importir Veteran Seluruh Indonesia hari Sabtu tanggal 5 Djuni jang lalu di Ragunan — Pasar Minggu, Djakarta.

Kita sekarang seolah-olah terpaku pada struktur dan tatatjara kerdja sebagai akibat birokrasi jang meradjalela, Menteri Brigdjen A. Jusuf menan- daskan, halmana djustru harus kita brantas ha- bis-habisan sampai keakar-akarnja.

Dalam prasarannya Menteri memberikan gamba- ran mengenai tjara kerdja jang sadar akan tudjuan ("doelbewust") dan "adjusted" pada keadaan. Departemen Perdagangan adalah departemen untuk melajani rakjat, sedangkan petugas-petu- gasnja tidak boleh membuat dirinja mendjadi "untouchable" dengan menggunakan birokrasi se- bagai alat.

Menteri mengharapkan bahwa para pengusaha veteran mendjalankan social control terhadap pe- laksanaan daripada kebidjaksanaan jang telah di- tetapkan oleh Menteri.

Molto Departemen jang dipimpin oleh beliau sendiri adalah : Departemen untuk melajani ke- pentingan rakjat dan masjarakat pada umumnja serta memberikan "service" kepada para pengu- saha dalam bidang perdagangan pada chususnja. "Soal ekonomi bukan pertama-tama soal adminis- trasi, bukan pertama-tama soal accountancy apa- lagi soal birokrasi".

Menteri menjerukan agar para veteran meng- himpun kembali kekuatannya dan memupuk kemb- ali semangat tahun 1945. Ditegaskan bahwa De- partemen Perdagangan bukanlah untuk para ve- teran sadja misalnja; siapa jang menundjukkan kemampuannya dan kesanggupannya, merekalah jang berhak mendapat pelajanan.

Para veteran pada umumnja dan para peserta Mubes GABIVET pada chususnja seharusnya menganggap bahwa mereka sedang berdjoang de- ngan menggunakan azas-azas perdjoangan jang sama. Hanja bidangnja jang lain, demikian djuga alat perdjoangannya lain pula tudjuannya.



Menteri mendjelaskan bahwa kebidjaksanaan dalam bidang impor pada dewasa ini didasarkan pada "production approach" dalam pada mana hanya dibolehkan untuk mengimpor bahan-ba- baku, bahan penolong dan spareparts demi lantjaran dan kontinuita produksi sebagai realisasi dari amanat "BERDIKARI".

Importir harus bertindak atas nama Pemerintah dan ini bukan berarti bahwa Pemerintah "phy- cally" melaksanakan keseluruhan impor, tet- djenis barang jang akan diimpor, pelabuhan per- palan dan sebagainya kesemuanya ditetapkan o- lleh Pemerintah.

Incentives bagi importir masih tjukup asal di- laksanakan untuk kepentingan Negara dan masjarakat.

Kita harus bekerdja setjara "doelbewust" untuk mentjapai tudjuan, djanganlah mengutamakan "self survival" dalam tahap revolusi sekarang ini, napatkanlah "national survival" diatas segala-galanya, dan tudjuan bersama kita adalah menjelekan revolusi untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur.

Kepada para eksportir diberikan kesempatan dan fasilitas sebesar-besarnya untuk bertindak atas inisiatif sendiri. Pemerintah hanya memberikap "guidance", akan tetapi pada pihak jang lain terdapat siapa jang menjeleweng akan diambil tindakan tegas.

Hal ini adalah untuk mentjegah "licentie jagers". Menteri mensinjalir adanja unsur-unsur tertentu jang memburuk-burukkan nama veteran, hal manjuga harus diberantas terutama oleh kalangan veteran sendiri.

Djanganlah menodai nama veteran sehingga mereka tidak sebagai "werkgever" maupun sebagai "werkknemer" veteran hilang bonafiditasnja.

Menteri menjerukan agar para veteran sebagai tenaga laksana dalam bidang perdagangan harus menduduki "leading position" dengan dasar jang kuat berupa "technical skill" umpamanja.

Brigdjen A. Jusuf selandjutnja mengemukakan bahwa kita hendaknya djangan terlalu meremehkan kemampuan dan kesanggupan jang ada pada kita. Kita harus "adjust" pada kebutuhan Zaman sekarang, pada peningkatan tahap revolusi, mengikutijalan arus masa. Dalam soal pengangkutan hasil-hasil daerah misalnja, bilamana kapal ditunggu-tunggu tak kundjung datang, dapatlah pengangkutan itu dilakukan misalnja dengan perahu-perahu kecil (Bugis/Makasar) daripada hasil-hasil daerah itu tertimbun dan mendjadi busuk. Walaupun perahu-perahu kecil jang dapat diangkut oleh perahu-perahu besar terbatas, namun adalah lebih baik demikian umpamanja, apabila hanja mengeluh sukarnja pengangkutan itu tanpa ada usaha untuk mentjari djalan keluar sendiri dengan kenjataan dan keadaan jang berlaku.

Soal ekonomi adalah pertama-tama soal orientasi, soal gerichtheid, soal kearahan atau ketepatan, soal adjustment pada realitas".

Peningkat mengenai segi teknis dan problematika-problematik dari perekonomian kita, Menteri menjajumlukan bahwa perlu ditjiptakannya suatu teknik dalam bidang perdagangan jang tidak

birokratis dan harus dapat mengikuti irama dan tuntutan revolusi. Menteri mengemukakan tjonjot mengenai peraturan pengendalian harga. Hal ini adalah tidak "adjusted" pada realitas oleh karena pembentukan harga terutama tergantung pada hukum demand and supply. Selama lebih dari sepuluh tahun kita mengimpor beras dari berbagai negara seperti Thailand dan Birma umpamanja dengan harga US \$. 100 djuta. Hal ini hanya memperkaya petani-petani di Thailand dan Birma saja. Ini merupakan suatu ketidakadilan, mengapa kita berani bayar US \$ 100 djuta kepada orang luar negeri, sedangkan kepada petani bangsa Indonesia sendiri Rp. 50,— saja sudah marah-marah, sudah menimbulkan reaksi jang bukan-bukan.

Menteri mengingatkan para peserta musjawarah besar GABIVET bahwa dalam bidang perdagangan hanya ada satu Departemen saja jang bertugas dan berwenang untuk menetapkan kebijaksanaannja yakni Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri.

Demikian pula departemen-departemen lain harus menjadiri tudjuan daripada perdagangan jang memerlukan adanja kerdjasama dan synchronisasi kebijaksanaan dari departemen-departemen jang berwenang dalam bidang perekonomian, misalnja: Urusan Bank Sentral, Departemen P3, Bea dan Tjukai, Perhubungan Laut dan sebagainya.

Sehubungan dengan ini Menteri menegaskan bahwa beliau hanya tunduk pada satu-satunya "policy", yakni kebijaksanaan jang ditetapkan oleh PJM. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Dengan demikian "beleid" jang didjalankan Menteri direstui Presiden Sukarno karena ditudjukan demi kepentingan Revolusi Indonesia dan tertjapainja masjarakat jang adil dan makmur.

Menteri menjerukan agar para peserta Mubes membantu Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri dengan memberikan "positieve gegevens" mengenai pengalaman dan kesulitan-kesulitan dalam daerah-daerah kerdjanja, mengingat bahwa Mubes GABIVET ini dihadiri oleh wakil-wakil dari 18 daerah.

Pada achir prasarannya Menteri menjatakan kejakinannya bahwa para veteran akan mendapat "leading position" dalam bidang perdagangan, seperti mereka djuga pernah mendjadi pelopor dari revolusi kita.

Adjaran² Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno

I

Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme

Sebagai Aria Bima-putera, jang lahirnja dalam zaman perdjoangan, maka INDONESIA-MUDA inilah melihat tjahaja hari pertama-tama dalam zaman jang rakjat-rakjat Asia, lagi berada dalam perasaan tak senang dengan nasibnja. Tak senang dengan nasib-ekonominja, tak senang dengan nasib politiknja, tak senang dengan segala nasib jang lain-lainnja.

Zaman "senang dengan apa adanja", sudahlah lalu.

Zaman baru : zaman *muda*, sudahlah datang sebagai fadjar jang terang tjuatja.

Zaman teori kaum kuno, jang mengatakan, bahwa "siapa jang ada dibawah, harus terima senang, jang ia anggap tjukup-harga duduk dalam perben-daharaan riwayat, jang barang kemas-kemasnja berguna untuk memelihara siapa jang lagi berdiri dalam hidup", kini sudahlah tak mendapat peng-anggapan lagi oleh rakjat-rakjat Asia itu. Pun makin lama makin tipislah kepertjajaan rakjat-rakjat jang mempertuankannja itu, adalah sebagai "voogd" jang kelak kemudian hari akan "ontvoogden" mereka; makin lama makin tipislah keper-tjajaannja, bahwa rakjat-rakjat jang mempertuankannja itu ada sebagai "saudara-tua", jang dengan kemauan sendiri akan melepaskan mereka, bila-mana mereka sudah "dewasa", "akil-balig", atau "masak".

Sebab tipisnja kepertjajaan itu adalah bersendi *pengetahuan*, bersendi *kejakinan*, bahwa jang men-jebakkan kolonisasi itu bukanlah keinginan pada kemasjhuran, bukan keinginan melihat dunia-asing, bukan keinginan merdeka, dan bukan pula oleh karena negeri rakjat jang mendjalankan kolonisasi itu ada terlampau sesak oleh banjarknja penduduk, — sebagai jang telah diadjarkan oleh *Gustav Klemm*—, akan tetapi asalnja kolonisasi ialah teristimewa soal *rezeki*.

"Jang pertama-tama menjebakkan kolonisasi ialah hampir selamanja kekurangan bekal-hidup dalam tanah-airnja sendiri", begitulah *Dietrich Schafer* berkata. Kekurangan rezeki, itulah jang mendjadi sebab rakjat-rakjat Eropah mentjari rezeki dinegeri lain ! Itulah pula jang mendjadi sebab rakjat-rakjat itu mendjadjah negeri-negeri, dimana mereka bisa mendapat rezeki itu. Itulah pula jang membikin "ontvoogding"-nja negeri-negeri djadjahan oleh negeri-negeri jang mendjad-jahnja itu, sebagai suatu barang jang sukar di-pertjajainja. Orang tak akan gampang-gampang

melepaskan bakul-nasinja, djika pelepasan ba-itu mendatangkan matinja.

Begitulah, bertahun-tahun, berwindu-windu rakjat-rakjat Eropah itu mempertuankan negeri Asia. Berwindu-windu rezeki-rezeki A masuk kenegerinja. Teristimewa Eropah-Barat jang bukan main tambah kekajaannja.

Begitulah tragiknja riwayat-riwayat negeri-geri djadjahan ! Dan keinsjafan akan tragik inilah jang menjadarkan rakjat-rakjat djadjahan itu; bab, walaupun lahirnja sudah alah dan taklah maka *Spirit of Asia* masihlah kekal. Roch A masih hidup sebagai api jang tiada padam; Keinsjafan akan tragik inilah pula jang sekarang mendjadi njawa pergerakan rakjat di Indonesia kita, jang walaupun dalam maksudnja sama, mempunyai tiga sifat : NASIONALISTIS, ISLAMISTIS dan MARXISTIS-lah adanja.

Mempeladjari, mentjahari hubungan antara ketiga sifat itu, membuktikan, bahwa tiga haluan dalam suatu negeri djadjahan tak guna berseteru satu sama lain, membuktikan pula, bahwa ketiga gelombang ini bisa bekerdja bersama-sama mendjadi *satu* gelombang jang maha-besar dan maha kuat, *satu* ombak-taufan jang tak dapat ditangkal terdjangnja, itulah kewadajiban jang kita sendiri harus memikulnja.

Akan hasil atau tidaknja kita mendjalankan wadajiban jang seberat dan semulia itu, bukan kita jang menentukan. Akan tetapi, kita tidak boleh putus-putus berdaja-upaja, tidak boleh habis ichtiar mendjalankan kewadajiban ikut mempersatukan gelombang-gelombang tahadi. Sebab kita yakin, bahwa *persatuanlah* jang kelak kemudian hari membawa kita kearah terkabul impian kita : Indonesia Merdeka ! Entah bagaimana tertjapainja persatuan itu; entah pula bagaimana rupanja persatuan itu akan tetapi tetaplah. Itulah kapal jang membawa kita ke-Indonesia-Merdeka itu, ialah Kapal-Persatuan adanja ! Maka, djurumudi jang akan membuat dan mendjalankan Kapal Persatuan itu kini barangkali belum ada, akan tetapi yakinlah kita pula, bahwa kelak kemudian hari *mustilah* datang saatnja. Sang Mahatma itu berdiri ditengah kita !.....

Itulah sebabnja kita dengan besar hati mendjalari dan ikut meratakan djalan jang menuju persatuan itu. Itulah maksudnja tulisan jang pendek ini.

Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme !

Inilah azas-azas yang dipeluk oleh pergerakan-pergerakan rakyat diseluruh Asia. Inilah faham-faham yang menjadi rochnja pergerakan-pergerakan di Asia itu. Rohnja pula pergerakan² di Indonesia kita ini.

Partai Boedi Oetomo, "marhum" Nationalistische Partij yang kini masih "hidup", Partai Pergerakan Islam, Perserikatan Minahasa, Partai Komunis Indonesia, dan masih banyak partai-partai lain itu masing-masing mempunyai rochnja Nasionalisme, rochnja Islamisme, atau rochnja Marxisme adanya. Dapatkah rochnja-rochnja ini dalam politik djadjanan bekerdja bersama-sama menjadi satu Roch yang Besar, Roch Persatuan ?

Apakah Roch Persatuan, yang akan membawa kita ke kebangsaan ke-Besaran ?

Dapatkah dalam tanah djadjanan pergerakan Nasionalisme itu dirapatkan dengan pergerakan Islamisme yang pada hakekatnja tiada bangsa, dengan pergerakan Marxisme yang bersifat perperjuangan internasional ?

Dapatkah Islamisme itu, ialah sesuatu agama, dalam politik djadjanan bekerdja bersama-sama dengan Nasionalisme yang mementingkan bangsa, dengan materialismenja Marxisme yang mengadjar perperjuangan ?

Akan hasilkah usaha kita merapatkan Boedi Oetomo yang begitu sabar-halus (gematigd), dengan Partai Komunis Indonesia yang begitu keras dan radikal, begitu radicaal-militant terdjadnja ?

Boedi Oetomo yang begitu evolusioner, dan Partai Komunis Indonesia, yang walaupun ketjil sendiri, oleh musuh-musuhnja begitu didesak dan ditentang, oleh sebab rupa-rupanja musuh-musuhnja yakin akan peringatan Al Carthill, bahwa "yang mendatangkan pemberontakan-pemberontakan itu biasanja bagian-bagian yang terketjil dan bagian-bagian yang terketjil sekali" ?

Nasionalisme ! Kebangsaan !

Dalam tahun 1882 Ernest Renan telah membuka pendapatnja tentang faham "bangsa" itu. "Bangsa" itu menurut pudjangga ini adalah suatu golongan, suatu azas-akal, yang terdjadi dari dua hal: pertama-tama rakyat itu dulunja harus bersama-sama mendjalani satu riwayat; kedua, rakyat itu sekarang harus mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu. Bukan djenis (ras), bukanja bahasa, bukanja agama, bukanja persamaan butuh, bukanja la batas-batas negeri yang mendjadikan "bangsa" itu.

Dari tempo-tempo belakangan, maka selainnja penulis-penulis lain, sebagai Karl Kautsky dan Karl Radek, teristimewa Otto Bauer-lah yang mempeladjar soal "bangsa" itu.

"Bangsa itu adalah suatu persatuan perangai yang terdjadi dari persatuan hal-ichwal yang telah mendjalani oleh rakyat itu", begitulah katanja.

Nasionalisme itu ialah suatu iktikad; suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat itu adalah satu golongan, satu "bangsa" !

Bagaimana djuga bunjinja keterangan-keterangan yang telah diadjar oleh pendekar-pendekar ilmu yang kita sebutkan diatas tadi, maka tetaplah bahwa rasa nasionalistis itu menimbulkan suatu rasa pertjaja akan diri sendiri, rasa yang mana adalah perlu sekali untuk mempertahankan diri didalam perdjouangan menempuh keadaan-keadaan, yang mau mengalahkan kita.

Rasa pertjaja akan diri sendiri inilah yang memberi keteguhan hati pada kaum Boedi Oetomo dalam usahanja mentjari Djawa-Besar; rasa pertjaja akan diri sendiri inilah yang menimbulkan ketetapan hati pada kaum revolusioner-nasionalis dalam perdjouangannya mentjari Hindia Besar atau Indonesia-Merdeka adanya.

Apakah rasa nasionalisme, — yang, oleh keperperjuangan akan diri sendiri itu, begitu gampang mendjadi kesombongan-bangsa, dan begitu gampang mendapat tingkatnja yang kedua, ialah kesombongngan ras, walaupun faham ras (djenis) ada setinggi langit bedanja dengan faham bangsa, oleh karena ras itu ada suatu faham biologis, sedang nationaliteit itu suatu faham sosiologis (ilmu pergaulan hidup), — apakah nasionalisme itu dalam perdjouangan-djadjanan bisa bergandengan dengan Islamisme yang dalam hakekatnja tiada bangsa, dan dalam lahirnja dipeluk oleh bermatjam-matjam bangsa dan bermatjam-matjam ras; — apakah Nasionalisme itu dalam politik kolonial bisa rapat-diri dengan Marxisme yang internasional, interrasial itu ?

Dengan ketetapan hati kita menjawab : bisa !

Sebab, walaupun Nasionalisme itu dalam hakekatnja mengetjualikan segala fihak yang tak ikut mempunyai "keinginan hidup menjadi satu" dengan rakyat itu; walaupun Nasionalisme itu sesungguhnya mengetjilkan segala golongan yang tak merasa "satu golongan, satu bangsa" dengan rakyat itu; walaupun Kebangsaan itu dalam azasnja menolak segala perangai yang terdjadnja tidak" dari persatuan hal-ichwal yang telah dijajani oleh rakyat itu", — maka tak boleh kita lupa, bahwa manusia-manusia yang mendjadikan pergerakan Islamisme dan pergerakan Marxisme di Indonesia-kita ini, dengan manusia-manusia yang mendjalankan pergerakan Nasionalisme itu semuanya mempunyai "keinginan hidup menjadi satu"; bahwa mereka dengan kaum Nasionalis itu merasa "satu golongan, satu bangsa"; — bahwa segala fihak dari pergerakan kita ini, baik Nasionalis maupun Islamis, maupun pula Marxis beratus-ratus tahun lamanja ada "persatuan hal-ichwal", beratus-ratus tahun lamanja sama-sama bernasib tak merdeka ! Kita tak boleh lalai bahwa teristimewa "persatuan hal-ichwal", persatuan nasib, inilah yang menimbulkan rasa "segolongan" itu. Betul rasa-golongan ini masih membuka kesempatan untuk perselisihan satu sama lain; betul sampai kini, belum pernah ada persahabatan yang

kokoh diantara fihak-fihak pergerakan di Indonesia-kita ini, — akan tetapi **b u k a n l a h** pula maksud tulisan ini membuktikan, bahwa perselisihan itu tidak bisa terdjadi. Djikalau kita sekarang mau berselisih, amboi, tak sukarlah mendatangkan perselisihan itu sekarang pula!

Maksud tulisan ini ialah membuktikan, bahwa **persahabatan** bisa tertjapai!

Hendaklah kaum Nasionalis jang mengetjualikan dan mengetjilkan segala pergerakan jang tak terbatas pada Nasionalisme, mengambil teladan akan sabda Karamchand Gandhi: „Buat saja, maka tjinta saja pada tanah-air itu, masuklah dalam tjinta pada segala manusia. Saja ini seorang patriot, oleh karena saja manusia dan bertjara manusia. Saja tidak mengetjualikan siapa djuga” Inilah rahasianja, jang Gandhi tjukup kekuatan mempersatukan fihak Islam dengan fihak Hindu, fihak Parsi dengan fihak Jain, dan fihak Sikh jang djumlahnja lebih dari tigaratus djuta itu, lebih dari enam kali djumlah putera Indonesia, hampir seperlima dari djumlah manusia jang ada dimuka bumi ini!

Tidak adalah halangannja Nasionalis itu dalam geraknja bekerdja bersama-sama dengan kaum Islamis dan Marxis. Lihatlah kekalnja perhubungan antara Nasionalis Gandhi dengan Pan-Islamis Maulana Mohammad Ali, dengan Pan-Islamis Sjaukat Ali, jang waktu pergerakan non-cooperation India sedang menghaibat, hampir tiada pisahnja satu sama lainnja. Lihatlah geraknja partai Nasionalis Kuomintang di Tiongkok, jang dengan ridla hati menerima faham-faham Marxis: tak setudju pada kemiliteran, tak setudju pada Imperialisme, tak setudju pada kemedalan!

Bukannja kita mengharap, jang Nasionalis itu supaja berobah faham djadi Islamis atau Marxis, bukannya maksud kita menjuruh Marxis dan Islamis itu berbalik mendjadi Nasionalis, akan tetapi impian kita ialah kerukunan, persatuan antara tiga golongan itu.

Bahwa sesungguhnya, asal **mau** sahadjaja... tak kuranglah djalan kearah persatuan. Kemauan, pertjaja akan ketulusan hati satu sama lain, keinsjafan akan pepatah „rukun membikin sentausa” (itulah sebaik-baiknja djembatan kearah persatuan), tjukup kuatnja untuk melangkahi segala perbedaan dan keseganan antara segala fihak-fihak dalam pergerakan kita ini.

Kita ulangi lagi : Tidak adalah halangannja Nasionalis itu dalam geraknja, bekerdja bersama-sama dengan Islamis dan Marxis.

Nasionalis jang sedjati, jang tjintanja pada tanah-air itu bersendi pada pengetahuan atas susunan ekonomi-dunia dan riwayat, dan bukan semata-mata timbul dari kesombongan bangsa belaka, — nasionalis jang bukan chauvinis, tak boleh tidak, haruslah menolak segala faham pengetjualian jang sempit-budi itu. Nasionalis jang sedjati, jang nasionalismenja itu bukan semata-mata suatu copie atau tiruan dari nasionalisme Barat, akan tetapi timbul dari rasa tjinta akan manusia dan

kemanusiaan, — nasionalis jang menerima rasa nasionalismenja itu sebagai suatu wahju dan melaksanakan rasa itu sebagai suatu bakti, adalah terhindar dari segala faham keketjilan dan keseripitan. Baginja, maka rasa tjinta bangsa itu adalah lebar dan luas, dengan memberi tempat pada lain lain sesuatu, sebagai lebar dan luasnja udara jang memberi tempat pada segenap sesuatu jang perlu untuk hidupnja segala hal jang hidup.

Wahai, apakah sebabnja ketjintaan-bangsa dan banjak nasionalis Indonesia lalu mendjadi kebentjangan, djikalau dihadapkan pada orang² Indonesia jang berkejakinan Islamistis? Apakah sebabnja ketjintaan itu lalu berbalik mendjadi permusuhan djikalau dihadapkan pada orang-orang Indonesia jang bergerak Marxis? Tiadakah tempat dalam sanubarinja untuk nasionalismenja **Gopala Krishna Gokhate, Mahatma Gandhi, atau Chita Ranjan Das?**

Djanganlah hendaknja kaum kita sampai berpeluk jingonationalism, sebagai jingo-nationalismenja **Arya-Samaj** di India pembelah dan pertjahan persatuan Hindu-Muslim; sebab jingo-nationalism jang sematjam itu „achirnja pastilah binasa”, oleh karena „nasionalisme hanjalah dapat mentjapai apa jang dimaksudkannja, bilamana berlandskapi sendi atas azas-azas jang lebih sutji”.

Bahwasanja, hanja nasionalisme - ke - Timur jang sedjatilah jang pantas dipeluk oleh nasionalis Timur jang sedjati. Nasionalisme-Eropah, ialah suatu nasionalisme jang bersifat serang-menjerang, suatu nasionalisme jang mengedjar keperluan sendiri, suatu nasionalisme perdagangan jang untung atau rugi, nasionalisme jang sematjam itu achirnja **pastilah** alah, **pastilah** binasa.

Adakah keberatan untuk kaum Nasionalis jang sedjati, buat bekerdja bersama-sama dengan kaum Islam, oleh karena Islam itu melebihi kebangsaan dan melebihi batas-negeri ialah super-nasionalisme super-teritorial? Adakah internasionaliteit Islam suatu rintangan buat geraknja nasionalisme, buat geraknja kebangsaan?

Banjak nasionalis-nasionalis diantara kita jang sama lupa bahwa pergerakan nasionalisme dan Islamisme di Indonesia ini - ja, diseluruh Asia ada sama asainja, sebagai jang telah kita uraikan diawal tulisan ini: dua-duanja berasal nafsu manusia „Barat”, atau lebih tegas, melawan kapitalisme dan imperialisme Barat, sehingga sebenarnya bukan lawan, melainkan kawannjalah adanja. Tanpa lebih luhurnjalah sikap nasionalis **Prof. M. Vaswani**, seorang jang bukan Islam, jang menukilkan: „Djikalau Islam menderit sakit, maka Roch kenakan dekan Timur tentulah sakit djuga; sebab masalah sangatnja negeri² Muslim kehilangan kemerdekaan njanja, makin lebih sangat pula imperialisme Eropah mentjekek Roch Asia. Tetapi, saja pertjaja pada Asia-sediakala; saja pertjaja bahwa Rochnja akan menang. Islam adalah internasional, dan kalau Islam merdeka, maka nasionalisme kita adalah diperkuat oleh segenap kekuatannja internasional itu.”

Dan bukan itu sahaja. Banjak nasionalis-nasionalis kita jang sama lupa, bahwa orang Islam, dimanapun djuga ia adanja, diseluruh „Darul Islam”, menurut agamanja, **wadjib** bekerdja untuk keselamatan orang negeri jang ditempatinja. Nasionalis-nasionalis itu lupa, bahwa orang Islam jang sungguh-sungguh mendjalankan ke-Islam-annja, baik orang Arab maupun orang India, baik orang Mesir maupun orang manapun djuga, djikalau berdiam di Indonesia, **wadjib** pula bekerdja untuk keselamatan Indonesia itu. "Dimana-mana orang Islam bertempat, bagaimanapun djuga djauhinja dari negeri tempat kelahirannja, didalam negeri jang baru ia masih mendjadi satu bahagian dari pada **rakjat Islam**, dari pada **Persatuan Islam**. Dimana-mana orang Islam bertempat, disitulah ia harus **mentjintai dan bekerdja** untuk keperluan negeri itu dan rakjatnja".

Inilah Nasionalisme Islam! Sempit-budi dan sempit-pikiranlah nasionalis jang memusuhi Islamisme berupa ini. Sempit-budi dan sempit pikiranlah ia, oleh karena ia memusuhi suatu azas, jang, walaupun internasional dan interracial, mewadjibkan ada segenap pemeluknja jang ada di Indonesia, bangsa apa merekapun djuga, mentjintai dan bekerdja untuk keperluan Indonesia dan rakjat Indonesia djuga adanja!

Adakah pula keberatan untuk kaum Nasionalis berdjati, bekerdja bersama-sama dengan kaum Marxis, oleh karena Marxisme itu internasional djuga? Nasionalis jang segan berdekatan dan bekerdja bersama-sama dengan kaum Marxis, - Nasionalis jang sematjam itu menundjukkan ketiadaan jang sangat, atas pengetahuan tentang berputarnja pada-politik dunia dan riwayat. Ia lupa, bahwa asal pergerakan Marxis di Indonesia atau Asia, djuga merupakan tempat asal pergerakan mereka. Ia lupa, bahwa arah pergerakannja sendiri itu atjap kali sesuai dengan arah pergerakan bangsannja jang Marxistis tahadi. Ia lupa, bahwa memusuhi bangsannja jang Marxistis itu, samalah arannja dengan menolak kawan-sedjalan dan menampik adanja musuh. Ia lupa dan tak mengerti akan arti sikapnja saudara-saudarannja dilain-lain negeri Asia, umpamanja almarhum **Dr. Sun Yat Sen**, panglima Nasionalis jang besar itu, jang dengan segala kesenangan hati bekerdja bersama-sama dengan kaum Marxis walaupun beliau itu yakin, bahwa peraturan Marxis pada saat itu belum bisa diadakan dinegeri Tiongkok, oleh karena dinegeri Tiongkok itu tidak ada sjarat-sjaratnja jang tjukup-asak untuk mengadakan peraturan Marxis itu. Perlukah kita membuktikan lebih landjut, bahwa nasionalisme itu, baik sebagai suatu azas jang timbulinja dari rasa ingin hidup mendjadi satu; baik sebagai suatu keinsjafan rakjat, bahwa rakjat itu adalah satu golongan, satu bangsa; maupun sebagai suatu persatuan perangai jang terdjadi dari persamaan hal-ichwal jang telah didjalani oleh rakjat itu. - perlukah kita membuktikan lebih landjut bahwa Nasionalisme itu, asal sahaja jang memelu-

lukkja mau, bisa dirapatkan dengan Islamisme dan Marxisme? Perlukah kita lebih landjut mengambil tjontoh-tjontoh sikapnja pendekar-pendekar Nasionalis dilain-lain negeri, jang sama bergandengan tangan dengan kaum-kaum Islamis dan rapat-diri dengan kaum-kaum Marxis?

Kita rasa tidak! Sebab kita pertjaja bahwa tulisan ini, walaupun pendek dan djauh kurang sempurna, sudahlah tjukup djelas untuk Nasionalis-nasionalis kita jang mau bersatu. Kita pertjaja, bahwa semua Nasionalis-nasionalis-muda adalah berdiri disamping kita. Kita pertjaja pula, bahwa masih banjaklah Nasionalis-nasionalis kolot jang mau akan persatuan; hanjalah kebimbangan mereka akan kekalnja persatuan itulah jang menggetjilkan hatinja untuk mengichtiarkan persatuan itu. Pada mereka itulah terutama tulisan ini kita hadapkan; untuk merekalah terutama tulisan ini kita adakan.

Kita tidak menuliskan rentjana ini untuk Nasionalis-nasionalis jang tidak mau bersatu.

Nasionalis-nasionalis jang demikian itu kita serahkan pada pengadilan riwayat, kita serahkan pada putusannja mahkamah histori!

Islamisme, ke-Islam-an!

Sebagai fadjar sehabis malam jang gelap gelita, sebagai penutup abad-abad kegelapan, maka didalam abad kesembilanbelas berkilau-kilauanlah didalam dunia ke-Islam-an sinarnja dua pendekar, jang namanja tak akan hilang tertulis dalam buku-riwayat Muslim; **Sheikh Mohammad Abdouh**, Rektor sekolah tinggi Azhar, dan **Seyid Djamaluddin El Afgani** - dua panglima Pan-Islamisme jang telah membangunkan dan mendjundjung rakjat² Islam diseluruh benua Asia dari pada kegelapan dan kemunduran. Walaupun dalam sikapnja dua pahlawan ini ada perbedaan sedikit satu sama lain - Seyid Djamaluddin El Afgani ada lebih radikal dari Sheikh Mohammad Abdouh - maka mereka-lah jang membangunkan lagi kenjataan-kenjataan Islam tentang politik, terutama Seyid Djamaluddin, jang pertama-tama membangunkan rasa-perlawanan dihati sanubari rakjat-rakjat Muslim terhadap pada bahaja imperialisme Barat; merekalah terutama Seyid Djamaluddin pula, jang mula-mula mengchotbahkan suatu barisan rakjat Islam jang kokoh, guna melawan bahaja imperialisme Barat itu.

Sampai pada wafatnja dalam tahun 1896, Seyid Djamaluddin El Afgani, harimau Pan-Islamisme jang gagah-berani itu, bekerdja dengan tiada berhentinja, menanam benih ke-Islam-an dimanamana, menanam rasa-perlawanan terhadap pada ketamaan Barat, menanam kejakinan, bahwa untuk perlawanan itu kaum Islam harus "mengambil tekniknja kemadjuan Barat, dan mempeladjadi rahasia-rahasianja kekuasaan Barat". Benih-benih itu tertanam! Sebagai ombak makin lama makin hebat, sebagai gelombang jang makin lama makin tinggi dan besar, maka diseluruh dunia Muslim tentara-tentara Pan-Islamisme sama bangun dan

bergerak dari Turki dan Mesir, sampai ke Marocco dan Kongo, ke Persia, Afganistan.... membandjir ke India, terus ke Indonesia.... gelombang Pan-Islamisme melimpah kemana-mana!

Begitulah rakjat Indonesia kita ini, insjaf akan tragik nasibnja, sebagian sama bernaung dibawah bendera hidjau, dengan muka kearah Qiblah, mulut mengadji **La haula wala kouwata illa billah dan Billahi fisabilil ilahi!**

Mula-mula masih perlahan-lahan, dan belum begitu terang-benderanglah djalan jang harus diindjaknja, maka makin lama makin njata dan tentulah arah-arah jang diambilnja, makin lama makin banjaklah hubungannja dengan pergerakan-pergerakan Islam dinegeri-negeri lain; makin teranglah ia menundjukkan perangainja jang internasional; makin mendalamlah pula pendiriannja atas hukum-hukum agama. Karenanja, tak hairanlah kita, kalau seorang profesor Amerika, **Ralston Hayden**, menulis, bahwa pergerakan **Sarekat Islam** ini "akan berpengaruh besar atas kedjadiannja politik dikelak kemudian hari, bukan sahadjja di Indonesia, tetapi diseluruh dunia Timur djua adanja"! Ralston Hayden dengan ini menundjukkan kejakinnja akan perangai internasional dari pergerakan Sarekat Islam itu; ia menundjukkan pula suatu penglihatan jang djernih didalam kedjadian-kedjadian jang belum terdjadi pada saat ia menulis itu. Bukankah tudjuannja telah terdjadi? Pergerakan Islam di Indonesia telah ikut mendjadi tjabangnja Mu'tamar-ul 'Alamil Islami di Mekkah; pergerakan Islam Indonesia telah mentjeburkan diri dalam laut perdjoangan Islam Asia!

Makin mendalamnja pendirian atas keagamaan pergerakan Islam inilah jang menjebabkan keseganan kaum Marxis untuk meranatkan diri dengan pergerakan Islam itu; dan makin kemukannya sifat internasional itulah oleh kaum Nasionalis "kolot" dipandang tersesat; sedang hampir semua Nasionalis, baik „kolot" maupun „muda", baik evolutioner maupun revolusioner sama berkejakinan bahwa agama itu tidak boleh di-bawa² kedalam politik adanja. Sebaliknya, kaum Islam jang „fanatik", sama menghina politik kebangsaan dari kaum Nasionalis, menghina politik kerezekian dari kaum Marxis; mereka memandang politik kebangsaan itu sebagai sempit, dan mengatakan politik kerezekian itu sebagai kasar. Pendek kata, sudah „sempurna"-lah adanja perselisihan faham!

Nasionalis-nasionalis dan Marxis-marxis tahadi sama menuduh pada agama Islam, jang negeri-negeri Islam itu kini begitu rusak kendaannja, begitu rendah deradjatnja, hampir semuanja dibawah pemerintahan negeri-negeri Barat.

Mereka kusut faham! Bukan Islam, melainkan jang memeluknjalah jang salah! Sebab dipandang dari pendirian nasional dan pendirian sosialis, maka tinggi deradjat dunia Islam pada mulanja sukarlah ditjari bandingannja. Rusaknja kebesaran-nasional, rusaknja sosialisme Islam bukanlah disebabkan oleh Islam sendiri; rusaknja Islam itu jalah oleh karena rusaknja budi-pekeri orang-

orang jang mendjalankannja. Sesudah Amir Muawiah mengutamakan azas dinastis-keduniawian untuk aturan Chalifah, sesudahnja „Chalifah-chalifah itu mendjadi Radja", maka padamlah tabiat Islam jang sebenarnja. „Amir Muawiah-lah jang harus memikul pertanggungangan djawab atas rusaknja tabiat Islam jang njata bersifat sosialis dengan sebenar-benarnja", begitulah Oemar Said Tjokrominoto berkata. Dan, dipandang dari pendirian nasional, tidakkah Islam telah menundjukkan tjohtoh-tjontoh kebesaran jang mentjengangkan siapa jang mempeladjari riwayat-dunia, mentjengangkan bagi siapa jang mempeladjari riwayat-kultur?

Islam telah rusak, oleh karena jang mendjalakannja rusak budi-pekerinja. Negeri-negeri Barat telah merampas negeri-negeri Islam oleh karennja pada saat perampasan itu kaum Islam kurang taqwal tauhidnja, dan oleh karena menurut wet evolutioner satu „historische Notwendigkeit", satu keharusan riwayat, jang negeri-negeri Barat itu mendjalakan perampasan tahadi. Tebalnja tauhid itulah jang memberi keteguhan pada bangsa Riff menentang imperialisme Senanjol dan Perantjis jang bermeriam dan lengkap bersendjata!

Islam jang sedjati tidaklah mengandung azas anti-nasionalis: Islam jang sedjati tidaklah berbiat anti-sosialistis. Selama kaum Islamis menentusuh faham-faham Nasionalisme jang luas-budi dan Marxisme jang benar, selama itu kaum Islam tidak berdiri diatas Sirothol Mustaqim; selama tidaklah ia bisa mengangkat Islam dari kenistaan dan kerusakan tahadi! Kita sama sekali tidak mengatakan jang Islam itu setudju pada Materialisme atau perbendaan; sama sekali tidak melupakan jang Islam itu melebihi bangsa, super nasional. Kita hanja mengatakan, bahwa Islam jang sedjati itu mengandung tabiat-tabiat jang sosialis dan menetapkan kewadajiban-kewadjabannja jang mendjadi kewadajiban-kewadjabannja nasionalis pula.

Bukankah, sebagai jang sudah kita terangkan Islam jang sedjati mewadjabkan pada pemeluknja **mentjintai dan bekerdja untuk negeri jang ia ami, mentjintai dan bekerdja untuk rakjat dan taru mana ia hidup, selama negeri dan rakiat masuk Darul-Islam?** Seyid Djamaluddin El-Ghani dimana-mana telah mengchotbahkan nasionalisme dan patriotisme, jang oleh musuhnja lantas sahadja disebutkan „fanatisme"; dimana-mana pendekar Pan Islamisme ini mengchotbahkan kemat akan diri sendiri, mengchotbahkan rasa luhur diri, mengchotbahkan rasa kehormatan bangsa jang oleh musuhnja lantas sahadja dinamakan „chauvinisme" adanja. Dimana-mana, terutama Mesir, maka Seyid Djamaluddin menanam benih nasionalisme itu; Seyid Djamaluddinlah jang mendjadi „bapak nasionalisme Mesir didalam segenap bagian-bagiannja".

Dan bukan Seyid Djamaluddin sahadialah jang mendjadi penanam benih nasionalisme dan tjajid bangsa. Arabi Pasha, Mustafa Kamil, Moham-

urid Bey, Ali Pasha, Ahmed Bey Agayeff, Mommad Ali dan Shaukat Ali... semuanya adalah nglima Islam yang mengadjarkan tjinta-bangsa, muanja adalah propagandis nasionalisme dimasing-masing negerinja! Hendaklah pemimpin ini endjadi teladan bagi Islamis-islamisme kita yang anatik" dan sempit-budi, dan yang tidak suka engetahui akan wadjibnja merapatkan diri dengan gerakan bangsanja yang nasionalistis. Hendaklah Islamis-islamisme yang demikian itu ingat, bahwa pergerakannya yang anti-kafir itu, pasti menimbulkan rasa nasionalisme, oleh karena golongan-golongan yang disebutkan kafir itu adalah kebanyakan dari lain bangsa, bukan bangsa Indonesia! Islamisme yang memusuhi pergerakan nasional yang lajak bukanlah Islamisme yang sejati; Islamisme yang demikian itu adalah Islamisme yang „kolot“, Islamisme yang tak mengerti zaman!

Demikian pula kita yakin, bahwa kaum Islamis bisa kita rapatkan dengan kaum Marxis, walaupun pada hakekatnja dua fihak ini berbeda luas yang lebar sekali. Pedihlah hati kita, ingat akan gelap-gelitanja udara Indonesia, tatkala beberapa tahun yang lalu kita mendjadi saksi atas suatu perkelahian saudara; mendjadi saksi petjahlah permusuhan antara kaum Marxis dan Islamis; mendjadi saksi bagaimana tentara pergerakan kita telah terbelah djadi dua bagian yang memerangi satu sama lainnja. Pertarungan inilah isinja halaman-halaman yang paling suram dari buku riwayat kita. Pertarungan saudara inilah yang memang sia-sia segala kekuatan pergerakan kita, yang mustinja makin lama makin kuat itu; pertarungan inilah yang mengundurkan pergerakan kita dengan puluhan tahun adanja!

Aduhai! Alangkah kuatnja pergerakan kita searang umpama pertarungan saudara itu tidak teradi. Nistjaja kita tidak rusak-susunan sebagai karang ini; nistjaja pergerakan kita madju, walaupun rintangan yang bagaimana djuga!

Kita yakin, bahwa tiadalah halangan yang penghalang bagi persahabatan Muslim-Marxis itu. Diatas halangan-halangan kita terangkan, bahwa Islamisme yang sejati itu ada mengandung tabiat-tabiat yang sosialistis. Walaupun sosialistis itu masih belum tentu bermakna marxistis, walaupun kita mengetahui bahwa sosialisme Islam itu tidak bersamaan dengan azas Marxisme, oleh karena sosialisme Islam berazas Spiritualisme, dan sosialismenja Marxisme itu berazas Materialisme (perbendaan), walaupun begitu, maka untuk keperluan kita tjukup agaknja djikalau kita membuktikan bahwa Islam yang sejati itu sosialistislah adanja.

Kaum Islam tak boleh lupa, bahwa pemandangan Marxisme tentang riwayat menurut azas-perbendaan (materialistische historie opvatting) inilah yang sering kali mendjadi penundjuk-djalan bagi mereka tentang soal-soal ekonomi dan politik-nia yang sukar dan sulit; mereka tak boleh lupa, bahwa tjaranja (methode) Historis-Materialisme (ilmu perbendaan berhubungan dengan riwa-

jat) menerangkan kedjadian-kedjadian yang telah terdjadi dimuka bumi ini, adalah tjaranja mendjumkan kedjadian-kedjadian yang akan datang, adalah amat berguna bagi mereka!

Kaum Islamis tidak boleh lupa, bahwa kapitalisme, musuh Marxisme itu, ialah musuh Islamisme pula! Sebab *meerwaarde* sependjang faham Marxisme, dalam hakekatnja tidak lainlah daripada *riba* sependjang faham Islam. *Meerwaarde*, ialah teori: memakan hasil pekerdjaan lain orang, tidak memberikan bahagian keuntungan yang seharusnya mendjadi bahagian kaum buruh yang bekerdja mengeluarkan untung itu, - teori *meerwaarde* itu disusun oleh Karl Marx dan Friedrich Engels untuk menerangkan asal-asalnya kapitalisme terdjadi. *Meerwaarde* inilah yang mendjadi njawa segala peraturan yang bersifat kapitalistis; dengan memerangi *meerwaarde* inilah, maka kaum Marxisme memerangi kapitalisme sampai pada akar-akarnya!

Untuk Islamis sejati, maka dengan lekas sahadjalah teranglah baginja bahwa tak lajaklah ia memusuhi faham Marxisme yang melawan peraturan *meerwaarde* itu, sebab ia tak lupa, bahwa Islam yang sejati djuga memerangi peraturan itu; ia tak lupa, bahwa Islam yang sejati melarang keras akan perbuatan memakan *riba* dan memungut bunga. Ia mengerti, bahwa *riba* ini pada hakekatnja tiada lain dari pada *meerwaardenja* faham Marxisme itu!

„Djanganlah makan *riba* berlipat-ganda dan perhatikanlah kewadjabanmu terhadap Allah, mogamoga kamu beruntung“, begitulah tertulis dalam Al Qur'an, surah Al 'Imran, ayat 129!

Islamis yang luas pemandangan, Islamis yang mengerti akan kebutuhan-kebutuhan perlawanan kita, pastilah setuju akan persahabatan dengan kaum Marxis, oleh sebab ia insjaf bahwa memakan *riba* dan memungutan bunga, menurut agamanya adalah suatu perbuatan yang terlarang, suatu perbuatan yang haram; ia insjaf, bahwa inilah tjaranja Islam memerangi kapitalisme sampai pada akar dan benihnja, oleh karena, sebagai yang sudah kita terangkan dimuka, *riba* ini sama dengan *meerwaarde* yang mendjadi njawanja kapitalisme itu. Ia insjaf, bahwa sebagai Marxisme, Islam pula,” dengan kepertjajaannya pada Allah, dengan pengakuannya atas Keradjaan Tuhan, adalah suatu protes terhadap kedjahatannya kapitalisme”.

Islamis yang „fanatik“ dan memerangi pergerakan Marxisme adalah Islamis yang tak kenal akan larangan-larangan agamanya sendiri, Islamis yang demikian itu tak mengetahui, bahwa, sebagai Marxisme, Islamisme yang sejati melarang penumpukan uang setjara kapitalistis, melarang penimbunan harta-benda untuk keperluan sendiri. Ia tak ingat akan ayat Al Qur'an: „Tetapi kepada barang siapa menumpuk-numpuk emas dan perak dan membelandjkan dia tidak menurut djalannya Allah chabarkaulah akan mendapat satu hukuman yang tjelaka.“ Ia mengetahui, bahwa sebagai Mar-

xisme jang dimusuhi itu agama Islam dengan djalang jang demikian itu memerangi wujudnja kapitalisme dengan seterang-terangnja!

Dan masih banjaklah kewadajiban-kewadajiban dan ketentuan-ketentuan dalam agama Islam jang bersamaan dengan tudjuan-tudjuan dan maksud-maksud Marxisme itu! Sebab tidakkah pada hakekatnja faham kewadajiban zakat dalam agama Islam itu, suatu kewadajiban sikaja membagikan rezekinja kepada simiskin, pembagian-rezeki mana dikehendaki pula oleh Marxisme, - tentu sahadjadengan tjara Marxisme sendiri? Tidakkah Islam bertjotjokjan anasir-anasir „kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan” dengan Marxisme jang dimusuhi oleh banjak kaum Islamis itu? Tidakkah Islam jang sedjati telah membawa „segenap perikemanusiaan diatas lapangan kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan”? Tidakkah nabi-Islam sendiri telah mengadakan persamaan itu dengan sabda: „Hai, aku ini hanjalah seorang manusia sebagai kamu; sudahlah dilahirkan padaku, bahwa Tuhanmu jalah Tuhan jang satu?” Bukankah persaudaraan ini diperintahkan pula oleh ajat 13 Surah Al-Hudjarat, jang bunjinja: „Hai manusia, sungguhlah kami telah menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami djadikan dari padamu suku-suku dan tjabang-tjabang keluarga, supaja kamu berkenalkenalan satu sama lain?” Bukankah persaudaraan ini „tidak tinggal sebagai persaudaraan didalam teori sahadjad”, dan oleh orang-orang jang bukan Islam diaku pula adanja? Tidakkah sajang beberapa kaum Islamis memusuhi suatu pergerakan, jang anasir-anasirnja djuga berbunji „kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan”?

Hendaklah kaum Islam jang tak mau merapatkan diri dengan kaum Marxis, sama ingat, bahwa pergerakannya itu, sebagai pergerakan Marxis, adalah suatu gaung atau kumandangnja djerit dan tangis rakjat Indonesia jang makin lama makin sempit kehidupannya, makin lama makin pahit rumah tangganya. Hendaknja kaum itu sama ingat bahwa pergerakannya itu dengan pergerakan Marxis, banjaklah persesuaian tjita-tjita, banjaklah persamaan tuntutan-tuntutan. Hendaklah kaum itu mengambil teladan akan utusan keradjaan Islam Afganistan, jang tatkala ia ditanjai oleh suatu surat chabar Marxis telah menerangkan, bahwa, walaupun beliau bukan seorang Marxis beliau mengaku mendjadi „sahabat jang sesungguhnya” dari kaum Marxis, oleh karena beliau adalah suatu musuh jang haibat dari kapitalisme Eropah di Asia!

Sajang, sajanglah djikalau pergerakan Islam di Indonesia-kita ini bermusuhan dengan pergerakan Marxis itu! Belum pernahlah di Indonesia kita ini ada pergerakan, jang sesungguhnya merupakan pergerakan rakjat, sebagai pergerakan Islam dan pergerakan Marxis itu! Belum pernahlah dinegeri-kita ini ada pergerakan jang begitu menggetar sampai kedalam urat-sungsumnja rakjat, sebagai pergerakan jang dua itu! Alangkah

haibatnja djikalau dua pergerakan ini, dengan mana rakjat itu tidur dan dengan mana rakjat itu bangun, bersatu mendjadi satu bandjir jang sekuasa-kuasanya!

Bahagialah kaum pergerakan Islam jang insjand mau akan persatuan. Bahagialah mereka, oleh karena merekalah jang sesungguhnya mendjalankan perintah-perintah agamanya!

Kaum Islam jang tidak mau akan persatuan dan jang mengira bahwa sikapnja jang demikian itulah sikap jang benar, - wahai, moga-mogalah mereka itu bisa mempertanggungkan sikapnja jang demikian itu dihadapan Tuhannya!

Marxisme!

Mendengar perkataan ini, maka tampak sebagai suatu bajang-bajangan dipenglihatan kita gambarnja berdjajun-dujun kaum jang mudlarat dari segala bangsa dan negeri, putjat-muka dan kurus badan, pakaian ber-kojak²; tampak pada angangan kita dirinja pembela dan kampiun simudlarat tahadi, seorang ahli-fikir jang ketetapan hatinja dan keinsjafan akan kebiasaannya „mengingatn kita pada pahlawan-pahlawan dari dongeng-dongeng kuno Germania jang sakti dengan tiada teralahkan itu”, suatu manusia jang „geweldig” (haibat) jang dengan sesungguhnya bernama „grootmeester” (maha guru) pergerakan kaum buruh, yakni: Heinrich Karl Marx!

Dari muda sampai pada wafatnja, manusia jang haibat ini tiada berhenti-hentinja membela dan memberi penerangan pada simiskin, bagaimana mereka itu sudah mendjadi sengsara dan bagaimana mana mereka itu pasti akan mendapat kemenangan; tiada kesal dan tjapainja ia berusaha dan bekerdja untuk pembelaan itu; duduk diatas kursidimuka medja-tulisnja, begitulah ia dalam tahun 1883 menghembuskan nafasnja jang penghabisan

Seolah-olah mendengariah kita dimana-mananegeri suaranya mendengung sebagai guntur, tatkala ia dalam tahun 1847 menulis seruannya: „Kaum buruh dari semua negeri kumpulah mendjadi satu” Dan sesungguhnya! Riwayat-dunia berlumlah pernah mentjeriterakan pendapat dari seorang manusia, jang begitu tjepat masuknja dalam kejakinan satu golongan pergaulan-hidup, sebagai pendapatnja kampiun kaum buruh ini. Dari puluhan mendjadi ratusan, dari ratusan mendjadi ribuan dari ribuan mendjadi laksana, ketian, djutaan... begitulah djumlah pengikutnja bertambah-tambah. Sebab, walaupun teori-teorinja ada sangat sukar dan berat untuk kaum jang pandai dan terampil fikirn, tetapi „amatlah ia gampang dimengerti oleh kaum jang tertindas dan sengsara: kaum melarat fikirn jang berkeluh-kesah itu”.

Berlainan dengan sosialis-sosialis lain, jang mengira bahwa tjita-tjita mereka itu dapat tertjap dengan djalang persahabatan antara buruh dan madjikan, berlainan dengan umpamanya: Ferdinand Lassalle, jang teriaknja itu ada suatu teriak-perdamaian, Karl Marx, jang dalam tulisannya tidak satu kali mempersoalkan ka

h atau kata tjinta, membeberkan pula faham
tentang golongan; faham klassenstrijd,
mengadarkan pula, bahwa lepasnja kaum
buruh dari nasibnja itu, ialah oleh perlawanan-
damai terhadap pada kaum „bursuasi”, satu
perlawanan jang tidak boleh tidak, musti terdjadi
karena peraturan jang kapitalistis itu adanja.
Walaupun pembatja tentunja semua sudah se-
sikit-sedikit mengetahui apa jang telah diadarkan
oleh Karl Marx itu, maka berguna pulalah agak-
ka, djikalau kita disini mengingatkan, bahwa dja-
nja ahli-fikir ini ialah: - ia mengadakan suatu
ladjaran gerakan fikiran jang bersandar pada
perbedaan (Materialistische Dialectiek); - ia
membentangkan teori, bahwa harganja barang-
barang itu ditentukan oleh banjaknja „kerdja”
untuk membikin barang-barang itu, sehingga „ker-
a” ini ialah „wert-bildende Substanz”, dari ban-
g-barang itu (arbeids-waarde-leer); - ia mem-
berikan teori, bahwa hasil pekerdjaan kaum bu-
h dalam pembikinan barang itu adalah lebih
sahar harganja daripada jang ia terima sebagai
pah (meerwaarde); - ia mengadakan suatu pela-
jaran riwayat jang berdasar perikebendaan, jang
mengadarkan, bahwa „bukan budi-akal manusia
jang menentukan keadaannja, tetapi sebaliknya
keadaannja berhubungan dengan pergaulan-
duplah jang menentukan budi-akalnja” (materi-
istische geschiedenisopvatting); - ia mengadakan
teori, bahwa oleh karena „meerwaarde” itu didja-
kan kapital pula, maka kapital itu makin lama
makin mendjadi besar (kapitaalsaccumulatie), se-
ng kapital-kapital jang ketjil sama mempersatu-
n diri djadi modal jang besar (kapitaalscentra-
tie), dan bahwa, oleh karena persaingan, per-
bedaan-perusahaan jang ketjil sama mati terde-
k oleh perusahaan-perusahaan jang besar, se-
ngga oleh desakan-desakan ini achirnja tjuma
nggal beberapa perusahaan sahadjja jang amat
sarnja (kapitaalsconcentratie); - dan ia men-
ikan teori, jang dalam aturan kemodalan ini
sibnja kaum buruh makin lama makin tak me-
enangkan dan menimbulkan dendam hati jang
makin lama makin sangat (Verelendungstheorie);
teori-teori mana, berhubungan dengan kekurangan
tempat, kita tidak bisa menerangkan lebih landjut
la pembatja-pembatja jang belum begitu me-
tahuinja.

Meskipun musuh-musuhnja, diantara mana kaum
archis, sama menjangkal djasa-djasaanja Marx
ng kita sebutkan diatas ini, meskipun lebih dulu,
am tahun 1825, Adolphe Blanqui dengan tjara histories-materialistis sudah mengata-
a, bahwa riwayat itu „menetapkan kedjadian-
jadiannja” sedang ilmu ekonomi „menerangkan
ab-apa kedjadian-kedjadian itu terdjadi”; mes-
un teori meerwaarde itu sudah lebih dulu dilahir-
a oleh ahli-ahli-fikir sebagai Sismondi,
omson dan lain-lain; meskipun pula teori
sentralisasi-modal atau arbeidswaardeleer itu ada
ian-bagiannja jang tak bisa mempertahankan
terhadap kritik musuhnja jang tak djemu-

djemu mentjari-tjari salahnja; - meskipun begitu,
maka tetaplah, bahwa stelselnja Karl Marx itu
mempunyai pengertian jang tidak ketjil dalam
sifatnja umum, dan mempunyai pengertian jang
penting dalam sifat bagian-bagiannja. Tetaplah
pula bahwa, walaupun teori² itu sudah lebih dulu
dilahirkan oleh ahli fikir lain, dirinja Marx-lah,
jang meski „bahasa”nja itu untuk kaum „atasan”
sangat berat dan sukarnja, dengan terang-bende-
rang menguraikan teori² itu bagi kaum „tertindas
dan sengsara jang melarat fikiran” itu dengan pah-
lawan-pahlawannja, sehingga mengerti dengan ter-
rang-benderang. Dengan gampang sahadjja, sebagai
suatu soal jang „sudah mustinja-begitu”, mereka
lalu mengerti teorinja atas meerwaarde, lalu men-
ngerti, bahwa simadjikan itu lekas mendjadi kaja
oleh karena ia tidak memberikan semua hasil-pe-
kerdjaan padanja; mereka lalu sahadjja mengerti,
bahwa keadaan dan susunan ekonomilah jang me-
netapkan keadaan manusia tentang budi, akal,
agama, dan lain-lainnja, - bahwa manusia itu :
er ist was er ist; mereka lantas sahadjja
mengerti, bahwa kapitalisme itu achirnja pastilah
binasa, pastilah lenjap diganti oleh susunan per-
gaulan-hidup jang lebih adil, - bahwa kaum
„bursuasi” itu „teristimewa mengadakan tukang-
tukang penggali liang kuburnja”.

Begitulah teori-teori jang dalam dan berat itu
masuk tulang-sungsumnja kaum buruh di Eropah,
masuk pula tulang-sumsumnja kaum buruh di
Amerika. Dan „tidakkah sebagai suatu hal jang
adjaib, bahwa kepertjajaan ini telah masuk dalam
berdjuta-djuta hati dan tiada suatu kekuasaan
djuapun dimuka bumi ini jang dapat mentjambut
lagi dari padanja”. Sebagai tebaran benih jang di-
tiup angin ke-mana² tempat, dan tumbuh pula di-
mana-mana ia djatuh, maka benih Marxisme ini
berakar dan bersulur; dimana-mana pula, maka
kaum „bursuasi” sama menjiapkan diri dan ber-
usaha membasmii tumbuh-tumbuhan” bahaaja prole-
tar” jang makin lama makin subur itu. Benih jang
ditebar-tebarkan di Eropah itu, sebagian telah di-
terbangkan oleh tofan-zaman kearah chatulistiwa,
terus ke Timur, hingga djatuh dan tumbuh diantara
bukit-bukit dan gunung-gunung jang tersebar di-
segenap kepulauan „sabuk zamrud”, jang bernama
Indonesia. Dengungnja njanjian „Internasionale”,
jang dari sehari-ke sehari menggetarkan udara Ba-
rat, sampai-kuatlah haibatnja bergaung dan ber-
kumandang diudara Timur.....

Pergerakan Marxistis di Indonesia ini, ingkarlah
sifatnja kepada pergerakan jang berhaluan Nasio-
nalistis, ingkarlah kepada pergerakan jang berazas
ke-Islam-an. Malah beberapa tahun jang lalu, ke-
ingkaran ini sudah mendjadi suatu pertengkaran
perselisihan faham dan pertengkaran sikap, men-
djadi suatu pertengkaran saudara, jang, sebagai
jang sudah kita terangkan dimuka, menjuramkan
dan menggelapkan hati siapa jang mengutamakan
perdamaian, menjuramkan dan menggelapkan hati
siapa jang mengerti, bahwa dalam pertengkaran
jang demikian itulah letaknja kealahan kita. Ku-

burkanlah nasionalisme, kuburkanlah politik tjinta tanah air, dan lenjapkanlah politik-keagamaan, — begitulah seakan-akan lagu perdjongan jang kita dengar. Sebab katanja: Bukankah Marx dan Engels telah mengatakan, bahwa „kaum buruh itu tak mempunjai tanah-air”? Katanja: Bukankah dalam „Manifes Komunis” ada tertulis, bahwa „komunisme itu melepaskan agama”? Katanja: Bukankah Bebel telah mengatakan, bahwa bukanlah Allah jang membikin manusia, tetapi manusialah jang membikin-bikin Tuhan”?

Dan sebaliknya! Fihak Nasionalis dan Islamis tak berhenti-henti pula mentjatji-maki fihak Marxis, mentjatji-maki pergerakan jang „bersekutuan” dengan orang asing itu, dan mentjatji-maki pergerakan jang „mungkir” akan Tuhan. Mentjatji pergerakan jang mengambil teladan akan negeri Rusia jang menurut pendapatnja: azasnja sudah pulit dan terbukti tak dapat melaksanakan tjita-tjitanja jang memang suatu utopi, bahkan mendatangkan „kalang-kabutnja negeri” dan bahaja-kelaparan dan hawar-penjakit jang mengorbakan njawa kurang-lebih limabelas djuta manusia, suatu djumlah jang lebih besar dari pada djumlahnja sekalian manusia jang binasa dalam peperangan besar jang achir itu.

Demikianlah dengan bertambahnja tuduh-menyuduh atas dirinja masing-masing pemimpin, duduknja perselisihan beberapa tahun jang lalu: satu sama lain sudah salah mengerti dan saling tidak mengindahkan.

Sebab taktik Marxisme jang baru, tidaklah menolak pekerdjaan-bersama-sama dengan Nasionalis dan Islamis di Asia. Taktik Marxisme jang baru, malahan menjokong pergerakan-pergerakan Nasionalis dan Islamis jang sungguh-sungguh. Marxis jang masih sahadjja bermusuhan dengan pergerakan-pergerakan Nasionalis dan Islamis jang keras di Asia, Marxis jang demikian itu tak mengikuti aliran zaman, dan tak mengerti akan taktik Marxisme jang sudah berobah.

Sebaliknya, Nasionalis dan Islamis jang menundjuk-nundjuk akan „faillietnja” Marxisme itu, dan jang me-nundjuk² akan bentjana kekalang-kabutan dan bentjana-kelaparan jang telah terdjadi oleh „praktijknja” faham Marxisme itu, — mereka menundjukkan tak mengertinja atas faham Marxisme, dan tak mengertinja atas sebab terpelesetnja „practijknja” „tahadi. Sebab tidakkah Marxisme..... sendiri mengadjarkan, bahwa sosialismenja itu hanja bisa tertjapai dengan sungguh² bilamana negeri² jang besar² itu semua nja di-„sosialis”-kan?

Bukankah „kedjadian” sekarang ini djauh berlainan dari pada „voorwaarde” (sjarat) untuk terkabulnja maksud Marxisme itu?

Untuk adilnja kita punja hukuman terhadap pada „practijknja” faham Marxisme itu, maka haruslah kita ingat, bahwa „failliet” dan „kalang kabutnja”nja negeri Rusia adalah dipertjepat pula oleh penutupan atau blokkade oleh semua negeri-

negeri musuhnja; dipertjepat pula oleh hantaman dan serangan pada empatbelas tempat oleh musuh musuhnja sebagai Inggris, Perantjis, dan djendral djendral Koltchak, Denikin, Yudenitch dan Wrangel; dipertjepat pula oleh anti-propaganda jang dilakukan oleh hampir semua surat chabar diseluruh dunia.

Didalam pemandangan kita, maka musuh-musuhnja itu pula harus ikut bertanggung-djawa atas matinja limabelas djuta orang jang sakit dan kelaparan itu, dimana mereka menjokong penjerangan Koltchak, Denikin, Yudenitch dan Wrangel itu dengan harta dan benda; dimana umpamanja negeri Inggris, jang membuang-buang berdjuta djuta rupiah untuk menjokong penjerangan-penjerangan atas diri sahabatnja jang dulu itu, telah „mengotorkan nama Inggris didunia dengan menolak memberi tiap-tiap bantuan pada kerdja-penolongannya” sisakit dan silapar itu; dimana di Amerika, di Rumania, dan di Hongaria pada saat terdjadinja bentjana itu pula, karena terlalu banjarnja gandum, orang sudah memakai gandum itu untuk kaju bakar, sedang dinegeri Rusia orang-orang didistrik Samara makan daging anak-anaknja sendiri oleh karena laparnja.

Bahwa sesungguhnya, luhurlah sikapnja H.C. Wells, penulis Inggeris jang masjhur itu, seorang jang bukan Komunis, dimana ia dengan ta memihak pada siapa djuga, menuliskan bahwa, umpamanja kaum bolshevik itu „tidak dirintang-rintang mereka barangkali bisa menjelaskan suatu experiment (pertjobaan) jang mahabesar faedahnja bagi perikemanusiaan.... Tetapi mereka dirintang-rintang”.

Kita jang bukan komunis pula, kita tapuntak memihak pada siapa djuga. Kita hanjalah memihak kepada Persatuan-persatuan-Indonesia, kepada persahabatan pergerakan kita semua!

Kita diatas menulis, bahwa taktik Marxisme jang sekarang adalah berlainan dengan taktik Marxisme jang dulu. Taktik Marxisme, jang dulu sikapnja begitu sengit anti-kaum-kebangsaan dan anti-kaum-keagamaan, maka sekarang, terutama di Asia, sudahlah begitu berobah, hingga kesengitan „anti” ini sudah berbalik mendjadi persahabatan dan penjokongan. Kita kini melihat persahabatan kaum Marxis dengan kaum Nasionalis dinegeri Tiongkok; dan kita melihat persahabatan kaum Marxis dengan kaum Islamis dinegeri Afghanistan.

Adapun teori Marxisme sudah berobah pula. Memang seharusnya begitu! Marx dan Engels bukanlah nabi-nabi, jang bisa mengadakan aturan-aturan jang bisa terpakai untuk segala zaman. Teori-teorinja haruslah diubah, kalau zaman itu berobah; teori-teorinja haruslah diikuti perubahan-perubahannja dunia, kalau tidak mau mendjadi bangkrut. Marx dan Engels sendiripun mengesakan hal ini; mereka sendiripun dalam tulisan-tulisannja sering menundjukkan perubahan-faham atau perubahan tentang kedjadian-kedjadian pada

man mereka masih hidup. Bandingkanlah pendapat-pendapatnya sampai tahun 1847; bandingkanlah pendapatnya tentang arti „Verelendung” sebagai yang dimaksudkan dalam „Manifest Komunis” dengan pendapat tentang arti perkataan itu dalam „Das Kapital”, - maka segeralah tampak pada kita perubahan faham atau perubahan pandangan itu. Bahwasanya; benarlah pendapat sosial-demokrat Emile Vandervelde, dimana ia mengatakan, bahwa „revisionisme itu tidak mungkin dengan Bernstein, akan tetapi dengan Marx dan Engels adanya”.

Perubahan taktik dan perubahan teori itulah yang menjadi sebab, maka kaum Marxis yang „baru” baik „sabar” maupun yang „keras”, terutama di Asia, sama menjokong pergerakan nasional yang sungguh-sungguh. Mereka mengerti, bahwa dinegeri-negeri Asia, dimana belum ada kaum proletar dalam arti sebagai di Eropah atau Amerika itu, pergerakannya harus diubah sifatnya menurut pergaulan-hidup di Asia itu pula. Mereka mengerti, bahwa pergerakan Marxis di Asia haruslah berlainan taktik dengan pergerakan Marxis di Eropah atau Asia, dan haruslah „bekerja bersama-sama dengan partai-partai yang „klein-gerlijck”, oleh karena disini yang pertama-tama perlu bukan kekuasaan tetapi jalah perlawanan terhadap pada feodalisme”.

Supaya kaum buruh dinegeri-negeri Asia dengan kuasa bisa menjalankan pergerakan yang sosialis sesungguh-sungguhnya, maka perlu sekali dinegeri-negeri itu merdeka, perlu sekali kaum itu mempunyai nationale autonomie (otonomi nasional). „Nationale autonomie adalah suatu perjuangan yang harus ditudju oleh perjuangannya, oleh karena ia ada suatu upaja yang perlu sekali bagi politiknja” begitulah Otto Bauer berkata. Itulah sebabnja, maka otonomi nasional menjadi suatu hal yang pertama-tama harus diusahakan oleh pergerakan-pergerakan buruh di Asia itu. Itulah sebabnja, maka kaum buruh di Asia itu wajib bekerja bersama-sama dan menjokong segala pergerakan yang merebut otonomi nasional itu juga, dengan tidak menghitung-hitung, azas apakah pergerakan-pergerakan itu mempunyai. Itulah sebabnja, maka pergerakan Marxis di Indonesia ini harus pula menjokong pergerakan-pergerakan kita yang Nasionalistis dan demokratis yang mengambil otonomi itu sebagai maksudnja pula.

Kaum Marxis harus ingat, bahwa pergerakannya tak boleh tidak, pastilah menumbuhkan rasa Nasionalisme dihati-sanubari kaum buruh Indonesia, oleh karena modal di Indonesia itu kejar-ajakannya jalah modal asing, dan oleh karena ini perlawanan itu menumbuhkan suatu rasa tak senang dalam sanubari kaum-buruhnja rakjat dibawah” terhadap pada rakjat yang di-„atas”nja, dan menumbuhkan suatu keinginan pada nationale machtpolitiek dari rakjat sendiri. Mereka harus ingat, bahwa rasa-internasionalisme itu di Indonesia nistjaja tidak begitu

tebal sebagai di Eropah, oleh karena kaum buruh di Indonesia ini menerima faham internasionalisme itu pertama-tama jalah sebagai taktik, dan oleh karena bangsa Indonesia itu oleh „gehechtheid” pada negerinja, dan pula oleh kekurangan bekal, belum banyak yang nekat meninggalkan Indonesia, untuk mentjari kerdja di-lain² negeri, dengan iktikad: „ubi bene, ibi patria: dimana aturan-kerdja bagus, disitulah tanah-air saja”, - sebagai kaum buruh di Eropah yang menjadi tidak tetap-rumah dan tidak tetap tanah-air oleh karenanja.

Dan djikalau ingat akan hal-hal ini semuanya, maka mereka nistjaja ingat pula akan salahnja memerangi pergerakan bangsanja yang nasionalistis adanya. Nistjaja mereka ingat pula akan teladan-teladan pemimpin-pemimpin Marxis dilain-lain negeri, yang sama bekerja bersama-sama dengan kaum-kaum nasionalis atau kebangsaan. Nistjaja mereka ingat pula akan teladan pemimpin-pemimpin Marxis dinegeri Tiongkok, yang dengan ridla hati sama menjokong usahanya kaum Nasionalis, oleh sebab mereka insjaf bahwa negeri Tiongkok itu pertama-tama butuh persatuan nasional dan kemerdekaan nasional adanya.

Demikian pula, tak pantaslah kaum Marxis itu bermusuhan dan berbentusan dengan pergerakan Islam yang sungguh-sungguh. Tak pantas mereka memerangi pergerakan, yang sebagaimana sudah kita uraikan diatas, dengan seterang-terangnja bersikap anti-kapitalisme; tak pantas mereka memerangi suatu pergerakan yang dengan sikapnja anti-riba dan anti-bunga dengan seterang-terangnja jalah anti meerwaarde pula; dan tak pantas mereka memerangi suatu pergerakan yang dengan seterang²nja mendedjar kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan, dengan seterang²-nja mendedjar nationale autonomie. Tak pantas mereka bersikap demikian itu, oleh karena taktik Marxis-baru terhadap agama adalah berlainan dengan taktik Marxis-dulu. Marxis-baru adalah berlainan dengan Marxis dari tahun 1847, yang dalam „Manifest Komunis” mengatakan, bahwa agama itu harus di „abschaffen” atau dilepaskan adanya.

Kita harus membedakan Historis-Materialisme itu dari Wijsgerig-Materialisme; kita harus memperingatkan, bahwa maksudnja Historis-Materialisme itu berlainan dari pada maksudnja Wijsgerig-Materialisme tahadi. Wijsgerig-Materialisme memberi djawaban atas pertanyaan: bagaimanakah hubungannya antara fikiran (denken) dengan benda (materie), bagaimanakah fikiran itu terdjadi, sedang Historis-Materialisme memberi djawaban atas soal: sebab apakah fikiran itu dalam suatu zaman ada begitu atau begini; wijsgerig-materialisme menanyakan adanya (wezen) fikiran itu; historis-materialisme menanyakan sebab-sebabnja fikiran itu berubah; wijsgerig-materialisme mentjari asalnja fikiran, historis-materialisme mempeladjadi tumbuhnja fikiran; wijsgerig-materialisme adalah

Wijsgerig, historis-materialisme adalah historis.

Dua faham ini oleh musuh-musuhnja Marxisme di Eropah, terutama kaum geredja, senantiasa ditukar-tukarkan, dan senantiasa dikelirukan satu sama lain. Dalam propagandanja anti Marxisme mereka tak berhenti-henti mengusahakan kekeliruan faham itu; tak berhenti-henti mereka menuhuh², bahwa kaum Marxisme itu jalah kaum jang mempeladjarkan, bahwa fikiran itu hanjalah suatu pengeluaran sahadjja dari otak, sebagai ludah dari mulut dan sebagai empedu dari limpa; tak berhenti-henti mereka menamakan kaum Marxis suatu kaum jang menjembah benda, suatu kaum jang bertuhankan materi.

Itulah asalnja kebentjiaan kaum Marxis Eropah terhadap kaum geredja, asalnja sikap perlawanan kaum Marxis Eropah terhadap kaum agama. Dan perlawanan ini bertambah sengitnja, bertambah kebentjiannja, dimana kaum geredja itu memakai-makai agamanja untuk melindung-lindungi kapitalisme, memakai-makai agamanja untuk membela keperluan kaum atasan, memakai-makai agamanja untuk mendjalankan politik jang reaksioner sekali.

Adapun kebentjiaan pada kaum agama jang timbulnja dari sikap kaum geredja jang reaksioner itu, sudah didjatuhkan pula oleh kaum Marxis kepada kaum agama Islam, jang berlainan sekali sikapnja dan berlainan sekali sifatnja dengan kaum geredja di Eropah itu. Disini agama Islam adalah agama kaum jang tak merdeka; disini agama Islam adalah agama kaum jang di „bawah”. Sedang kaum jang memeluk agama Keristen adalah kaum jang bebas; disana agama Keristen adalah agama kaum jang di „atas”. Tak boleh tidak, suatu agama jang anti-kapitalisme, agama kaum jang tak merdeka, agama kaum jang di „bawah” ini; agama jang menjuruh mentjari kebebasan, agama jang melarang mendjadi kaum „bawah-an”, - agama jang demikian itu pastilah menimbulkan sikap jang tidak reaksioner, dan pastilah menimbulkan suatu perdjoangan jang dalam beberapa bagian sesuai dengan perdjoangan Marxisme itu.

Karenanja, djikalau kaum Marxisme ingat akan perbedaan kaum geredja di Eropah dengan kaum Islam di Indonesia ini, maka nistjaja mereka mengadjudkan tangannja, sambil berkata: saudara, marilah kita bersatu. Djikalau mereka menghargai akan tjontoh-tjontoh saudara-saudaranja seazas jang sama bekerdja bersama-sama dengan kaum Islam, sebagai jang terdjadi dilain-lain negeri, maka nistjajalah mereka mengikuti tjontoh-tjontoh itu pula. Dan djikalau mereka dalam pada itu djuga bekerdja bersama-sama dengan kaum Nasionalis atau kaum kebangsaan, maka mereka dengan tenteram-hati boleh berkata: kewadajiban kita sudah kita penuhi.

Dan dengan memenuhi segala kewadajiban Marxis-muda tahadi itu, dengan memperhatikan segala perobahan teori azasnja, dengan mendjalankan segala perobahan taktik pergerakannja itu, mereka boleh menjebutkan diri pembela rakjat jang tulus-hati, mereka boleh menjebutkan dirigaramnja rakjat.

Tetapi Marxis jang ingkar akan persatuan, Marxis jang kolot-teori dan kuno-taktiknja, Marxis jang memusuhi pergerakan kita Nasionalis dan Islamis jang sungguh-sungguh, Marxis jang demikian itu djanganlah merasa terlanggar kehormatannja djikalau dinamakan ratjun rakjat adanja.

Tulisan kita hampir habis.

Dengan djalan jang sudah djauh kurang sempurna, kita mentjoba membuktikan bahwa faham Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme itu dalam negeri djadjahan pada beberapa bagian menutup satu sama lain. Dengan djalan jang djauh kurang sempurna kita menundjukkan teladan pemimpin-pemimpin dilain negeri. Tetapi kita yakin, bahwa kita dengan terang-benderang menundjukkan ke ma u a n kita mendjadi satu. Kita yakin, bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia semuanja insjaf bahwa Persatuanlah jang membawa kita kearah ke-Besaran dan ke Merdekaan. Dan kita yakin pula bahwa, walaupun fikiran kita itu tidak mentjotjot semua kemauan dari masing-masing fihak, ia menundjukkan bahwa Persatuan itu bisa tertjapai. Sekarang tinggal menetapkan sahadjja organisasinnja, bagaimana Persatuan itu bisa berdiri; tinggal mentjari organisatornja sahadjja, jang mendjadi Mahatma Persatuan itu. Apakah Ibu-Indonesia jang mempunjai Putera-putera sebagai Oemar Saad, Tjokroaminoto, Tjipto Mangunkusumo dan Semolun, apakah Ibu-Indonesia itu tak mempunjai putera-putera jang bisa mendjadi Kampiun Persatuan itu?

Kita harus bisa menerima; tetapi kita djuga harus bisa memberi. Inilah rahasianja Persatuan itu. Persatuan tak bisa terdjadi, kalau masing-masing fihak tak mau memberi sedikit-sedikit pula.

Dan djikalau kita semua insjaf, bahwa kekuatan hidup itu letaknja tidak dalam menerima, tetapi dalam memberi; djikalau kita semua insjaf, bahwa dalam pertjerai-beraian itu letaknja benih perbudakan kita; djikalau kita semua insjaf, bahwa permusuhan itulah jang mendjadi asal kita pun „viadolorosa”; djikalau kita insjaf, bahwa Roch Rakjat Kita masih penuh kekuatan untuk mendjundjung diri menudju Sinar jang Satu jang berada di-tengah² kegelapan-gumpita jang mengelilingi kita ini, maka pastilah Persatuan terdjadi, dan pastilah Sinar itu tertjapai djuga.

Sebab Sinar itu dekat!

(Suluh Indonesia Muda, 1919)

DJALANKAN REVOLUSI DALAM TJARA BEKERDJA !



Pendidikan Kilat Kader Nasakom sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 114 tahun 1965 yang dimulai bertepatan dengan ulangtahun ke-20 lahirnja Pantja Sila dalam bentuk mendengarkan kuliah-kuliah dan tjeramah-tjeramah singkat sudah selesai. Tetapi pendidikan dalam arti yang lebih luas, jaitu pembulatan pengertian dan terutama praktek memperkuat persatuan Nasakom Indonesia dan menggalang Nasakom Internasional untuk menjelesaikan Revolusi Indonesia dan membangun Dunia Baru, masih berjauh daripada selesai.

Karena itu selaku Presiden Republik Indonesia, selaku Perdana Menteri, selaku Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata, selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional, selaku Mandataris MPRS dan selaku Pemimpin Besar Revolusi Indonesia saja minta kepada peserta-peserta Pendidikan Kilat Kader Nasakom yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Pengurus Besar Front Nasional supaya segera mendalami lebih lanjut bahan-bahan pelajaran yang telah ditentukan, dengan djalan mengadakan beladjar-bersama setjara terpimpin dalam unit-unit yang berkomposisikan Nasakom menurut lingkungan kerdja dan/

atau daerahnja masing-masing. Selanjutnja - dan ini jang lebih penting - melakukan gerakan turun kebawah sebagaimana yang dimaksudkan dalam amanatku kepada Sidang Pleno Pengurus Besar Front Nasional pada tanggal 25 Mei 1965 dan dalam keputusan-keputusan dari Sidang tersebut.

Itu berarti kalian sekaligus mendjalankan revolusi dalam tjara-bekerdja Front Nasional dan tjara-kerdja alat-alat revolusi lainnja, jaitu mengikis-habis semangat amtenar, membuang tjara memimpin dari belakang medja, mendjadi pemimpin-pemimpin Rakjat yang tidak hanja pandai mengadjar massa tetapi djuga pandai beladjar dari massa, sebagaimana yang diadajarkan dan dipraktekkan oleh tiap pemimpin revolusioner yang sedjati.

Revolusi dalam tjara-bekerdja itu adalah sjarat-mutlak untuk bisa melaksanakan dengan tjepat dan tepat prinsip berdikari dibidang ekonomi, disamping berkepribadian dalam kebudayaan dan berdaulat dalam politik, atau trisakti Tavip. Dan sukses-sukses dalam melaksanakan trisakti ini akan mempertinggi kemampuan dan wibawa Indonesia dalam mensukseskan CONEFO di Djakarta tahun 1966 - melalui Konferensi Asia-Afrika ke-II di Aldjazair tahun ini - suatu langkah raksasa dalam mempersatukan semua kekuatan anti imperialisme didunia berbentuk persatuan Nasakom Internasional untuk membangun dunia kembali menudju satu Dunia Baru yang kita tjita-tjitakan.

Kepada semua pedjabat dan pemimpin dari segala tingkatan saja minta supaya berusaha keras mendjadi teladan dan bergotong-rojong melaksanakan amanatku ini.

Front Nasional dan Kader² Nasakom, madjulah terus, madjulah terus! Saja selalu bersamamu dalam mengedjar Amanat Penderitaan Rakjat Indonesia dan Amanat Penderitaan Rakjat diseluruh Dunia!

Perkuat terus persatuan Nasakom Indonesia dan galang terus persatuan Nasakom Internasional!

Kita berada didjalan yang benar, karena itu Insja Allah Tuhan akan terus melimpahkan Taufiq dan Hidajat-Nja, dan kita pasti menang!

Presiden/Perdana Menteri/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Tertinggi FN/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia,

tertanda

SUKARNO,

KEBIDJAKSANAAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

KEPUTUSAN MENKO KOMPARTIMEN LUAR NEGERI/HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI No. 009/3/MPLN/SK/65. Tgl. 29 Maret 1965.

MENKO KOMPARTIMEN LUAR NEGERI/
HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI DAN
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

MENIMBANG :

bahwa perlu segera menetapkan ketentuan² pelaksanaan Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia No. Aa/B/44/65 Tahun 1965; tentang integrasi wewenang Urusan Perdagangan Luar Negeri;

MENINGAT :

Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia No. Aa/B/44/65 Tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KEPUTUSAN² TENTANG KEBIDJAKSANAAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI sebagai berikut :

Pertama :

Kebidjaksanaan pemasaran (marketing policy) barang² ekspor Indonesia keluar negeri : baik mengenai harga, djenis barang djumlah, negara tujuan, tjara² pemasaran dan sebagainya berdasarkan suatu kebidjaksanaan tertentu, ditetapkan oleh Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri.

Kedua :

Kebidjaksanaan dalam bidang impor jang men- tjakupi penetapan djenis barang, djumlah, negara asal dan tjara² mendatangkan barang² tersebut k Indonesia dan sebagainya ditetapkan oleh Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri.

Ketiga :

Hal² lain jang belum atau belum tjukup diatur dalam Keputusan ini diatur oleh Kuasa Menteri Per- dagangan Luar Negeri.

K keempat :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dita-apkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tgl. 29-3-'65.

MENTERI KOORDINATOR KOMPARTIME
LUAR NEGERI/HUBUNGAN EKONOMI LU
NEGERI DAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

t.t.d.

(DR SOEBANDRIO)

PEDJABAT-PEDJABAT STAF PRIBADI MENTERI

URUSAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI :

N a m a :	D j a b a t a n :
1. Drs. Aidit Alwi	Kepala Staf Pribadi
2. Soedjadi B.B.A.	Anggota Staf Pribadi
3. Asmuni Surjoharjono B.A.	Anggota Staf Pribadi
4. Amran Siregar S.H.	Anggota Staf Pribadi
5. Drs. Kushadi Kusdinar	Anggota Staf Pribadi

DEPARTEMEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI :

N a m a :	D j a b a t a n :
1. Soeprapto Ranoeatmodjo	Kepala Staf Pribadi
2. Sulaeman Kartasu- mitra S.H.	Anggota Staf Pribadi
3. A. Karim Usman S.H.	Anggota Staf Pribadi
4. Drs. Sjamsuridjal	Anggota Staf Pribadi
5. Warsito Puspojo S.H.	Anggota Staf Pribadi

KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI KEBIDJAKSANAAN PEMERINTAH DALAM BIDANG PERDAGANGAN EKSPOR DAN PEMBENTUKAN TEAM TEKNIS EKSPOR

Integrasi Wewenang Urusan Perdagangan Luar Negeri dan Kebidjaksanaan Perdagangan an Luar Negeri.

1. a. Dengan Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1965 ditetapkan bahwa: Kebidjaksanaan politik perdagangan luar negeri serta pelaksanaannya diintegrasikan dengan politik luar negeri dibawah pimpinan Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri. 1)

b. Dengan Keputusan Presidium Kabinet R.I. No. Aa/B/44/65 tahun 1965 tentang Integrasi Wewenang Urusan Perda-an Luar Negeri antara lain ditetapkan sebagai berikut: 2)

1. Semua aparatatur Pemerintah dan Badan Usaha Negara yang bergerak dibidang perdagangan luar negeri baik yang berada di Pusat, di daerah tingkat I maupun yang berada di luar negeri, setjara taktis, teknis dan fungsionil di-integrasikan kedalam wewenang dan tugas Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar dan Perdagangan Luar Negeri;

2. Perdagangan Luar Negeri harus merupakan suatu usaha yang bersifat Nasional (national effort);

3. Instansi-instansi yang berwenang dalam bidang fiskal, moneter, komunikasi, penetapan harga barang-barang ekspor dan lain-lain, harus mendukung usaha-usaha perdagangan luar negeri yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator tersebut diatas;

4. Dalam melaksanakan wewenang/tugas tersebut diatas Menteri Koordinator dibantu oleh suatu "board" yang terdiri dari unsur-unsur yang bersangkutan yang dianggap perlu;

5. Pelaksanaan wewenang tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan:

a. Penetapan kebidjaksanaan, perentjanaan dan pengawasan diatur ditingkat pusat;

b. Dalam rangka kebidjaksanaan dan rentjana tersebut pada ayat 1 maka aparatatur Pemerintah yang bergerak dibidang perda-

gangan luar negeri yang ada di daerah tingkat I berwenang untuk menentukan kebidjaksanaan teknis sesuai dengan keadaan setempat.

2. Tentang Kebidjaksanaan Perdagangan Luar Negeri, dalam Keputusan Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri (No. 009/3/MPLN/SK/65) antara lain ditetapkan bahwa: 3)

Kebidjaksanaan pemasaran (marketing policy) barang-barang ekspor Indonesia ke luar negeri, baik mengenai harga, djenis barang, djumlah, negara tudjuan, tjara-tjara pemasaran dan sebagainya, berdasarkan suatu kebidjaksanaan tertentu, ditetapkan oleh Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri.

3. Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri dalam surat keputusannya No. 010/3/MP LN/SK/65 tahun 1965 menetapkan tentang Target Ekspor 1965: 4)

a) Target ekspor tahun 1965 untuk seluruh Indonesia ditetapkan sebesar US \$ 600 djuta tidak termasuk:

1. Hasil ekspor dari Daerah Pelabuhan Bebas Sabang dan Propinsi Irian Barat dan

2. Hasil ekspor minjak bumi dan hasil-hasilnya.

b) Dalam rangka melaksanakan prinsip berdiri diatas kaki sendiri dan pelaksanaan dekonsentrasi dalam rangka Ekonomi Terpimpin, maka untuk men-tjapai target ekspor tahun 1965 tersebut diatas, ditetapkan target ekspor 1965 untuk tiap-tiap daerah tingkat I.

c) Para Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah dan Pantjatunggal daerah tingkat I diharapkan untuk memberikan fasilitas-fasilitas seperlunya dan mengamankan pelaksanaannya.

d) Aparat-aparat Pemerintah yang bertugas dibidang perdagangan ekspor seperti DEKT, BLLD, Bea dan Tjukai, komunikasi pada umumnya dan perhubungan laut pada khususnya agar menggunakan wewenang dan tanggung-dja wab yang diberikan kepadanya dengan penuh pengabdian kepada pelaksanaan perdagangan luar negeri.

II. Pembentukan Team Teknis Ekspor di Pusat dan di Daerah-daerah.

Berdasarkan Keputusan-keputusan Pemerintah mengenai integrasi Wewenang Urusan Perdagangan Luar Negeri dan Kebidjaksanaan Perdagangan Luar Negeri yang diuraikan dalam ad I diatas, maka dengan Surat Keputusannya No. 053/5/MPLN/SK/65 dan No. 058/6/MP LN/SK/1965 tahun 1965, yang mulai berlaku dari tanggal 23 Mei 1965, Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri telah menetapkan Team Teknis Ekspor di Pusat dan di Daerah-Daerah dengan ketentuan ketentuan sbb.:

1. Di Pusat dan di-tiap² Ibukota Daswati I didirikan Team Pelaksanaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebidjaksanaan Harga dan Realisasi Ekspor, jaitu:

di Djakarta : Team Teknis Ekspor Pusat
(disingkat Team Pusat),

di Daerah : Team Teknis Ekspor Daerah
(disingkat Team Daerah).

2. Personalia dari Team-Team dimaksud pada ad 1 terdiri dari :

Team Pusat :

Wakil-wakil dari Direktorat Ekspor, Direktorat Bea Tjukai, BLLD, Bipalindo, Bank Indonesia, Kesop III/KOTOE, Port authority Djakarta Raya dan G.P.E.I.S.

Team ini diketuai oleh Kepala Direktorat Marketing dan Research.

Team Daerah :

Kepala-kepala Tjabang Direktorat Ekspor, Bea Tjukai, BLLD, Bipalindo, Bank Devisa yang ditundjuk oleh Bank Indonesia, Penguasa Pelabuhan Daerah Tingkat I dan dari G.P.E.I.S.

Team ini diketuai oleh Kepala Perwakilan Urusan Perdagangan Luar Negeri DATI I dan Gubernur KDH. sebagai penasehat Team.

3. Perintjian Tugas :

A. Team Pusat :

- a. mengawasi keputusan-keputusan yang diambil oleh Team Daerah;

- b. memutuskan hal-hal yang diadjukan oleh Team Daerah;
- c. mengkoordiner ketentuan-ketentuan pendelegasian wewenang dari tiap-tiap instansi pusat yang bersangkutan kepada masing-masing tjabangnja.

B. Team Daerah :

- a. sebagai instansi, melakukan pekerjaan routine masing² yang ditugaskan oleh pusat instansinja dan dilengkapi dengan wewenang yang diperlukan.

- b. berupa Team Daerah :

- b. 1. membahas dan memutuskan kesulitan² dalam bidang teknis ekspor yang timbul sewaktu²;

- b. 2. bersama-sama menggariskan kebidjaksanaan pelaksanaan teknis ekspor sesuai dengan keadaan setempat;

- b. 3. mengajukan persoalan yang prinsipieel kepada Team Pusat;

- b. 4. melaporkan kepada masing-masing instansi pusatnja mengenai keputusan² yang telah diambil khusus yang menjangku bidangnya.

4. Keputusan² Team Daerah dan Pusat tidak dapat diganggu gugat oleh instansi manapun djuga;

5. Menginstruksikan kepada Kepala Direktorat Marketing dan Research untuk segera melaksanakan pembentukan Team-Team yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini.

Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan bahwa, dalam rangka usaha melantjarkan ekspor, perlu agar aparaturnya Pemerintah yang bergerak dibidang pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan ekspor di Daswati I berwenang untuk menentukan kebidjaksanaan sesuai dengan keadaan setempat dan perlu mengintegrasikan pelaksanaan tugas dari Direktorat Ekspor, Direktorat Bea Tjukai, BLLD dan tjabang²nja di Daerah.

1) Lihat W.P. no. 1

2) Lihat W.P. no. 1

3) Lihat halaman 15 madjalah ini

4) Lihat W.P. no. 1.

KEHARUSAN "SURVEY" TERHADAP BARANG² IMPOR ATAS BEBAN DEVISA NEGARA

KEPUTUSAN KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI
No. 051/5/MPLN/SK/65 TAHUN 1965

**KUASA MENTERI PERDAGANGAN
LUAR NEGERI,**

MENIMBANG :

- a. sering terdjadinja penjerahan barang² impor atas beban devisa Negara oleh suppliernja, bahwa kwalitas, kwantitasnja dsb. tidak sesuai dengan ketentuan² jang telah ditetapkan dalam kontrak pembeliannja;
- b. bahwa perlu dilakukannja pengawasan sebaik²nja atas penggunaan devisa Negara jaitu untuk mentjegah adanja kerugian² devisa Negara jang disebabkan tidak adanja pemeriksaan dengan teliti atas kwalitas/kwantitas dsb. dari barang² jang diimpor;
- c. bahwa telah adanja „Superintending Company of Indonesia Ltd.” suatu badan surveyor jang didirikan oleh Kementerian Perekonomian Republik Indonesia sebagai suatu usaha tjampur-an dengan General Superintendence Company Ltd. Geneva, badan mana memiliki kantor² perwakilan hampir diseluruh negara dan jang telah memiliki kepertjajaan dalam dunia Perdagangan Internasional;
- d. adanja kemanfaatan dan kegunaan kegiatan usaha badan tersebut dalam bidang superintendence, jaitu memberikan djasa²nja kepada fihak jang diwakilinja untuk melakukan pemeriksaan, pengudjian dan penilaian kwalitas, kwantitas dsb. atas barang jang diimpor maupun jang diekspor.

MENINGGAT :

- a. Surat Keputusan Menteri Perekonomian tgl. 20 September 1956 No. 11.460 a/M;
- b. Surat Keputusan bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian tgl. 24 Pebruari 1958 No. 135/M. Perdag.
1368 a/M. Perind.
- c. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 5439/M tanggal 14 Desember 1960;
- d. Surat Andjuran Menteri Perdagangan tgl. 24 Djuni 1958 No. 3998/M;
- e. Amanat berdikari P.J.M. Presiden R.I. Pemimpin Besar Revolusi dihadapan sidang MPRS tgl. 11 April 1965 di Bandung;

- f. Surat Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 043/MPDN/SK/65 tanggal 8 Mei 1965.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

Pertama : bahwa barang² jang diimpor oleh Perusahaan² Negara atau badan² lainnja atas beban devisa Negara (seperti RIB, deferred payment, production dsb.) perlu dilakukan Superintendence terhadap baik kwalitas, kwantitas, packing maupun pengapalan dan pembongkaran-nja.

Kedua : menundjuk Superintending Company of Indonesia Ltd., Djakarta untuk memberikan djasa²nja dalam melakukan superintendence atas barang² tersebut „PERTAMA” ditempat pelabuhan pengapalan dan/atau pelabuhan pembongkaran.

Ketiga : untuk kelantjaraan pelaksanaan tugas superintendence itu, dalam kontrak² pembelian dan Letter of Credit harus ditjantumkan dengan djelas penundjukkan Superintending Company of Indonesia Ltd. atau kantor² perwakilannja sebagai surveyor.

Keempat : SEGALA sesuatu jang berkenaan dengan pelaksanaan dari ketentuan² tersebut diatas supaja diselesaikan bersama oleh jang bersangkutan dengan Superintending Company of Indonesia Ltd., Djakarta.

Kelima : Apabila terdapat kekurangan/kekeliruan Surat Keputusan ini dapat diroboh seperlunja.

Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 20 Mei 1965.

**MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI/
KUASA MENTERI PERDAGANGAN
LUAR NEGERI**

u.b.

SOEDIRO M.A.

Pembantu Utama

MEMPERKENALKAN : SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA LTD.

PERUSAHAAN DAN TUGASNJA.

Superintending Company of Indonesia Ltd. adalah suatu perusahaan tjampuran (joint enterprise) jang didirikan oleh **Departemen Perdagangan** Republik Indonesia dan **General Superintendence Company Ltd.** di Geneva, Switserland. Superintending Company Of Indonesia Ltd. adalah cargo surveyor jang bergerak khusus dibidang pemeriksaan barang-barang import dan ekspor mengenai mutunja, timbangannja, pengepakannja, kerusakan²nja dan djuga melakukan pengawasan² pembongkaran dan pemuatan² barang² dari dan kedalam kapal, untuk mendjaga agar barang² jang dikapalkan dapat sampai ditempat tudjuannja dengan tiada mengalami kerusakan. Djuga mengadakan pemeriksaan atas mesin² dan projek² pabrik pada waktu pembuatannja dipabrik² dinegara asal.

Pendirian Superintending Company of Indonesia oleh Pemerintah ini dimaksudkan untuk mendjaga agar barang² export Indonesia dapat terdjaga mutunja, timbangannja, baik condisinja maupun pengepakannja, agar dipasaran dunia dapat bersaing dengan barang² jang sama jang asalnja dari lain negara.

Tudjuan ini diharapkan dapat tertjapai, apabila telah tertjapai kesadaran dari pada exportir² untuk memeriksakan barang²nja terlebih dahulu pada Superintending Company Ltd. sebelum barang² tersebut dikapalkan.

KANTOR² TJABANG, AGEN² DAN KORESPONDEN².

Superintending Company of Indonesia Ltd. ini mempunyai perwakilan², tjabang², agen² dan koresponden² baik diseluruh pelabuhan² diluar negeri maupun didalam negeri, sehingga dapat memberikan pelayanan hampir di seluruh pelabuhan dunia.

Daftar terlampir menundjukkan nama² dan alamat-alamat kantor² perwakilan, tjabang, agen dan Koresponden² daripada Superintending Coy of Indonesia Ltd. didalam negeri.

MATJAM² DJASA JANG DAPAT DIBERIKAN

Di Indonesia S.C.I. Ltd. dapat memberikan djasa² sebagai berikut :

1. Dibidang Export.

Atas nama exportir, importir ataupun atas nama sesuatu badan jang menghendaki, pemeriksaan² atas barang² export jang meliputi :

- a. Pengambilan tjontoh² barang jang akan diexport untuk keperluan penentuan mutunja : untuk keperluan arbitrase bila tidak terdapat persesuaian paham antara pihak² jang bersangkutan; untuk keperluan

luan analisa dilaboratorium²; tjontoh² untuk bukti pengapalan atau shipping samples; untuk keperluan penawaran dari tjalon pendjual kepada tjalon pembeli, dan lain²nja.

- b. Memeriksa mutu barang² export serta memberikan sertipikat untuk itu.
- c. Mengadakan pengawasan penimbangan² atas barang² ekspor dan memberikan sertipikat penimbangan.
- d. Mengadakan pengawasan atas pemuatan barang² kedalam kapal, kemudian memberikan sertipikat sebagai bukti pengapalan.
- e. Mengeluarkan sertipikat² termaksud dalam pasal 2, 3 dan 4 tersebut diatas untuk keperluan penarikan wesel dari bank dalam hal tersebut disyaratkan oleh pembeli untuk mendjamin bahwa barang² jang dikapalkan itu betul² telah memenuhi sjarat² jang tertjantum dalam kontrak pembelian jang telah disetujui kedua belai² pihak.
- f. Mengadakan pemeriksaan atas kerusakan barang dengan maksud agar barang² jang rusak djangan dimuat atau harus diganti dahulu dengan barang² jang bagus atas barang² jang telah diperbaiki.
- g. Mengadakan pengukuran² barang² atas nama agen² perkapalan untuk keperluan penentuan freight.
- h. Mengadakan pemeriksaan ruangan kapal mengenai kebersihannja dan sjarat² jang harus dipenuhi oleh kapal untuk keperluan pengangkutan sesuatu barang agar barang² itu dapat diangkut dengan aman dan tanpa mengalami kerusakan karena stowage jang kurang baik didalam kapal. Barang² jang dapat diperiksa oleh Superintending meliputi a.l.

Karet	Kopra
T e h	Kopi
Tembakau	Kapok
Cassia Vera	Rotan
Serat-serat	Kaju ²
Pala	Kembang-Pala
Kulit ²	Hasil ² Kina
Hasil Tapioka	Damar/Kopal
Timah	Bidjih Mangan ²

Bidjih Bauxit dan lain² hasil alam, hasil pertanian dan hasil² hutan.

Gula dan hasil² dari padanja.

Lada dan lain² rempah².

Minjak Kelapa Sawit dan Kepala Sawit

Minjak² terbang (Kenanga, Vertivet, Citronel

ISTILAH² TEHNIK

Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan Departemen PDK telah menetapkan istilah² dari bidang teknik.

Istilah² tersebut adalah:

Inggris	Indonesia	Inggris	Indonesia
abaft	= diburitan, mundur	blast	= 1. angin keras; 2. letusan, ledakan
abeam	= melintang kapal	(to) blast	= menghanturkan, memusnahkan
(to) aberate	= menjimpang, membias, aberasi	blast - cock	= tjerat penghembus
aberation	= penjimpangan, pembiasan, aberasi	blast furnace	= tanur tinggi
ability	= kemampuan, daja	blast - furnase-gas	= gas tanur tinggi
able - bodied	= pelaut - kawakan	blind flange	= flensa buta.
about - sledge	= palu godam		
(to) abrade	= mengampelas		
abrasion	= pengampelasan		
abrasive	= ampelas		
abrasive cloth	= ampelas besi, lenen ampelas		
abrasive paper	= ampelas kaju, kertas ampelas		
abscissa	= absis		
absolute measure	= ukuran mutlak		
absolute movement	= gerak mutlak		
absolute unit	= satuan mutlak		
absolute power	= gaja mutlak		
absolute pressure	= tekanan mutlak		
absolute weight	= berat mutlak		
absolute zero	= titik nol mutlak		
binding - wire	= kawat ikat		
biphase	= dua fase		
biphase motor	= motor dua fase		
biplane	= kapal terbang dwisajap		
bipolar	= dwikutub		
bipolar armature	= angker dwikutub		
bipolar contact-line	= penjalur kontak dwikutub		
bipolar generator	= dinamo dwikutub		
(to) bisect	= membagi dua		
bisection	= pamaruhan		
bisector	= garis bagi (sudut)		
bismuth	= bismuth		
bit	= 1. mulut kakaktua; 2. besi gurdi		
bit-brace	= gurdi dada		
bitumen	= aspal		
(to) bituminized	= mengaspal		
bituminous	= beraspal		
bituminous coal	= arang gemuk		
bivalve	= dwikutup		
(to) black	= menghitamkan		
(to) blacken	= mendjelaga		
black damp	= gas tambang		
blacksmith	= pandai besi		
blacksmith's shop	= bengkel pandai besi		
blade	= daun (pisau)		
(to) blanch	= 1. mengelantang; 2. melapis timah putih		

PENETAPAN HARGA PENJERAHAN BARANG² EKSPOR GOL. I NO. 30/HP/65.

Berlaku dari tgl. 7 s/d 12 Djuni 1965.

KARET PER POUND

RSS. I	US. \$.	sen 21 1/8
RSS. II	US. \$.	sen 20 7/8
RSS. III	US. \$.	sen 19 1/8
RSS. IV	US. \$.	sen 17 3/4
RSS. V	US. \$.	sen 14 1/2
THIN PALE CREPE I	US. \$.	sen 20 3/4
THIN PALE CREPE II	US. \$.	sen 19 5/8
THIN PALE CREPE III	US. \$.	sen 18 1/4
BROWN 1 X	US. \$.	sen 15 1/4
BROWN 2 X	US. \$.	sen 14
BROWN 3 X	US. \$.	sen 12 5/8
BLANKET C		
(No. 3 Thick Blanket Crepe)	US. \$.	sen 11 3/4
BLANKET D		
(No. 4 Thick Blanket Crepe)	US. \$.	sen 10 1/8
REMILLED 3		
(No. 3 Thin Brown Crepe)	US. \$.	sen 11 3/4
REMILLED 4		
(No. 4 Thin Brown Crepe)	US. \$.	sen 10 1/8
FLATBARK CREPE	US. \$.	sen 7 1/4
CUTTINGS A	US. \$.	sen 18 1/4
CUTTINGS B	US. \$.	sen 16 1/2
CUTTINGS C	US. \$.	sen 13 7/8
SMOKED BLANKET I	US. \$.	sen 13 1/4
SMOKED BLANKET II	US. \$.	sen 12 1/16

Djakarta, 5 Djuni 1965.

PIMPINAN
BIRO LALU LINTAS DEWISA
DIREKTORIUM

ttd.

R. A. Kartadjoemena

Ketua

Photo Reportase

PERAJAAN HA
NEGERI/URUS



Boyke A. Jusuf Putra sebagai Protokol Upatjara menudju tempat dimana ia memberikan Komando. (photo Harry).

"Ikrar Anak" diserahkan kepada Ibu Menteri Brig. Djen. A. Jusuf oleh Endang Sujadi S.P. Putri. (photo Harry).

"Sang Merah Putih" lambang Pusaka Negara dikibarkan oleh Zulzaeni Putri, dari Hadisoenarjo Putra, Retno Hastrodipuro Putri. (photo Harry).



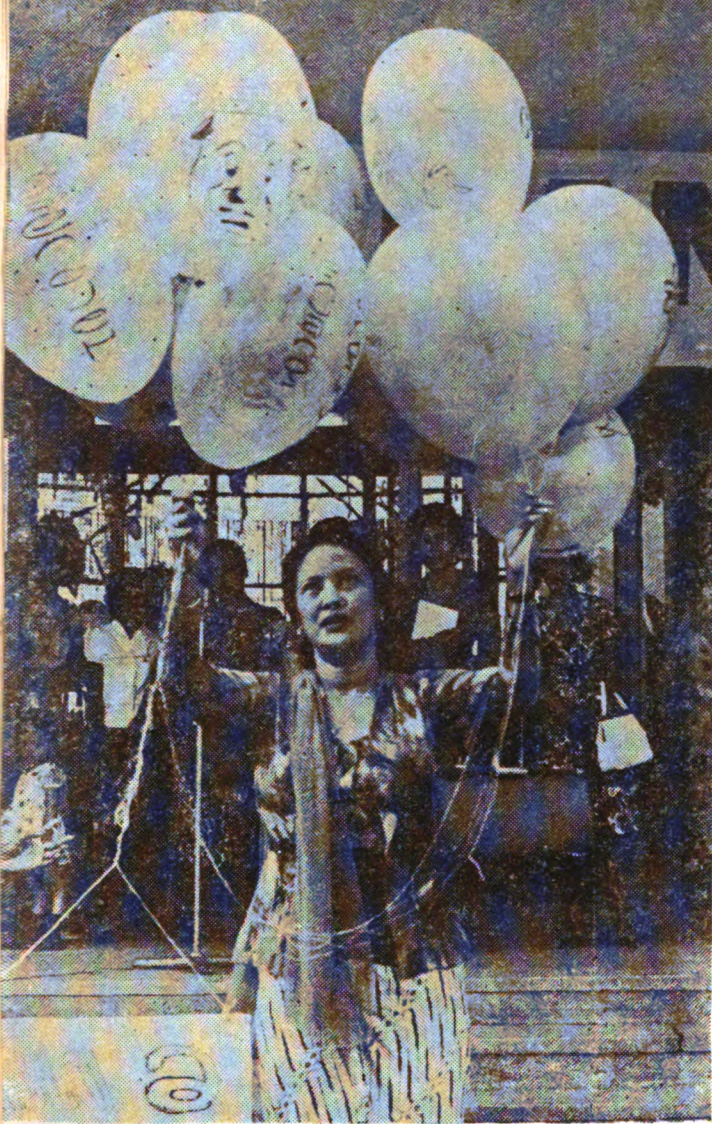
KANAK DALAM LINGKUNGAN KELUARGA DEPT. PERDAGANGAN DALAM
ANGAN LUAR NEGERI PADA TANGGAL 6 DJUNI 1965



*Perlombaan berhadiah pada hari anak², perlombaan karung jang sangat menarik,
Lutju bukan,? (photo Harry).*

✚ *Carnaval anak² menundjukkan kader² pada hari depan kita, (photo Harry).*





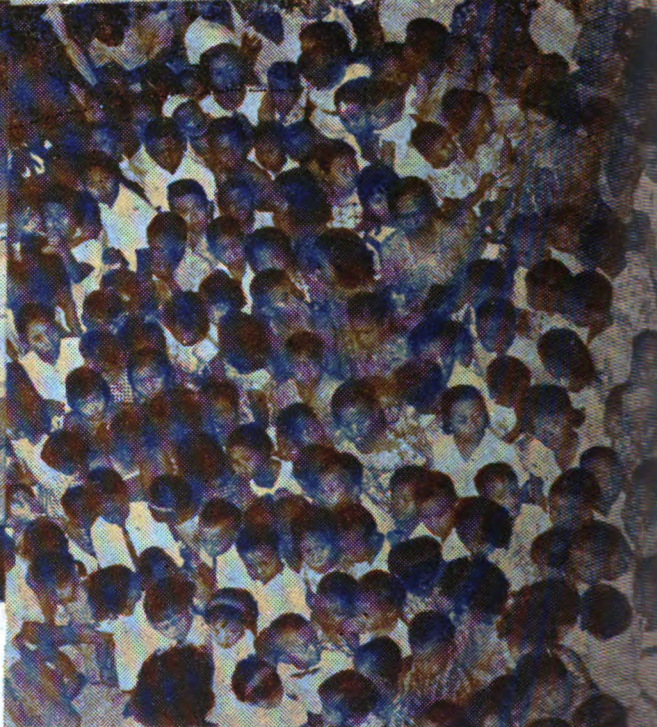
Ibu Menteri Brig. Djen. A. Jusuf melepaskan balon² peng-ganjangan Malaysia dalam menjambut Hari Ulang Tahun P.J.M. Presiden Soekarno/Hari Kanak² I.K.D.P. (photo Harry).



Massa Anak² merajakan Hari Anak² dan Hari Ulang Tahun P.J.M. Presiden Soekarno. (photo Harry).



Disaksikan oleh Pak Ooq, Ibu Menteri Brig. Djen. A. Jusuf memberikan salam bangga kepada salah seorang putri kami jang mendapat hadiah menggambar dari Kesedjahteraan Pegawai Departemen Perdagangan. (photo Harry).



3. Dibidang Import

- a. Mengadakan discharge survey dari suatu muatan kapal, untuk memberikan kesaksian kepada agen² kapal ataupun kepada penerima barang mengenai keadaan barang waktu dibongkar dari dalam kapal.
- b. Mengadakan pemeriksaan mengenai kerusakan² atas barang² yang telah dibongkar dari dalam kapal, kemudian memberikan sertipikat untuk keperluan claim atas barang yang rusak ataupun yang hilang.
- c. Melakukan pengawasan atas tally sesuatu barang yang sedang dibongkar dari kapal untuk memberikan kesaksian mengenai lengkap atau tidaknya djumlah barang yang akan diterimakan oleh kapal kepada penerima barang.
- d. Mengadakan pengawasan atas penjerahan barang dari gudang² veem kepada sipemilik barang dan memberikan kesaksian mengenai lengkap atau tidaknya barang yang diserahkan ataupun mengenai kerusakan² atas barang. Sertipikat yang dikeluarkan oleh S.C.I.-Ltd. dapat dipakai untuk keperluan claim oleh pihak yang merasa dirugikan.

DJASA LAIN JANG DAPAT DIBERIKAN OLEH S.C.I.-LTD. DI INDONESIA :

3. Djasa-djasa lain jang dapat diberikannya didalam negeri.

- a. Mengadakan pemeriksaan atas gudang² dan tempat² penjempanan barang lain, sebelum tempat tersebut digunakan untuk menjimpan sesuatu barang untuk mengetahui apakah gudang² tersebut tjukup baik atau tjotjok untuk menjimpan sesuatu barang yang mempunyai sifat² dan sjarat² penjempanan tertentu.
- b. Mengadakan pemeriksaan atas mesin² dan pabrik² mengenai keamanan bekerdjanja. Untuk hal ini S.C.I. Ltd. telah mendapat pengakuan dari Badan Keselamatan Kerdja Departemen Perburuhan. (Surat Keputusan terlampir).

DJASA-DJASA DILUAR NEGERI

Diluar negeri dapat memberikan djasa² sebagai berikut :

- a. Atas nama pembeli² di Indonesia S.C.I. Ltd. dapat mengadakan pemeriksaan² atas mesin², alat² techniek, pabrik² dan project². Pemeriksaan ini dilakukan menurut blue print dan sjarat² yang telah disetujui oleh pendjual dan pembeli dan jang telah ditjantumkan didalam kontrak pembeliannya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh ahli² techniek S.C.I. Ltd. diluar negeri dengan maksud untuk melindungi kepentingan pembeli² di Indonesia, agar

barang² jang dikapalkan ke Indonesia betul² telah memenuhi sjarat² kontraknja. Barang² jang tidak memenuhi sjarat² kontraknja akan dilaporkan kepada pembeli² di Indonesia dan kemudian dapat ditjegah untuk dikirimkan kepada pembeli.

- b. Mengadakan pemeriksaan atas pembuatan kapal² jang dipesan oleh pembeli-pembeli di Indonesia. Pemeriksaan dan pengawasan atas pembuatan kapal ini dilakukan menurut gambar² jang telah disetujui oleh pendjual dan pembeli. Pemeriksaan ini djuga meliputi pemeriksaan/testing mengenai bahan² baku jang akan dipakai untuk pembuatan kapal².
- c. Mengadakan running test atas mesin² atau pabrik² jang telah djadi dan siap untuk dikirimkan kepada pembeli di Indonesia, satu dan lain untuk memberikan kepastian kepada pembeli bahwa mesin² tersebut akan dapat berdjalan lantjar setibanja di Indonesia. Kekurangan² jang ada dapat di perbaiki sebelum dikirimkan kepada pembeli.
- d. Mengadakan pemeriksaan dan testing² atas kendaraan bermotor mengenai bahan² bakunya maupun mengenai kekuatan tariknja serta lain² sjarat jang ditjantumkan didalam kontrak pembeliannya.
- e. Mengadakan pemeriksaan² atas barang² manufactures lainnja jang akan dikirim kepada pembeli di Indonesia untuk mendjaga agar barang² jang akan dikirim itu betul² memenuhi sjarat² jang telah tertjantum didalam kontrak. Untuk pemeriksaan jang tersebut di atas S.C.I. Ltd. mengeluarkan certificate hannya apabila barang² jang telah diperiksa itu telah memenuhi sjarat² dalam kontraknja. Certificate tersebut biasanja merupakan salah satu sjarat² bank jang diminta oleh bank untuk dapat melakukan pembajarannya kepada pendjual. Apabila barang² jang telah diperiksa tersebut ternyata tidak memenuhi sjarat² jang telah disetujui didalam kontrak, S.C.I. Ltd. tidak mengeluarkan certificate, dan dengan demikian apabila pendjual memaksa mengirimkan barangnja kepada pembeli dia tidak akan dapat menarik uangnya dari bank karena tidak adanya certificate itu. Dengan demikian pembeli dapat dilindungi kepentingannya.
- f. Mengadakan pemeriksaan atas pembongkaran dan penimbangan² barang² jang didatangkan dari Indonesia. Kemudian menetapkan beratnja jang telah dibongkar untuk keperluan pembajarannya kepada pendjual di Indonesia. Dengan demikian maka kepentingan pendjual di Indonesia dapat dilindungi, karena pembeli tidaklah dapat menentukan berat barang jang diterimanya dengan semaunja sendiri, jang akan merugikan pihak pendjual di Indonesia.

- g. Djuga mengadakan pemeriksaan atas mutu barang² export dari Indonesia dipelabuhan pembongkaran, satu dan lain untuk melindungi kepentingan exportir di Indonesia mengenai mutu barang² jang telah diterima oleh pembeli di luar negeri. Pemeriksaan tersebut diatas dikerdjakan atas nama exportir² di Indonesia.
- h. Mengadakan pemeriksaan atas dan pada waktu pengepakan barang² tersebut di-pabrik² sebelum barang² itu dimuat kedalam kapal. Dengan demikian kemungkinan kerusakan barang karena kurang baiknja pengepakan dapat dihindarkan.
- i. Mengadakan pemeriksaan atas pemuatan barang² kedalam kapal, untuk mendjaga agar barang² itu ditumpuk dan disusun didalam kapal menurut sjarat² jang diperlukan oleh sesuatu barang, dengan demikian kerusakan² selama perdjalan dapat dihindarkan.
- j. Mengadakan pemeriksaan atas ruangan² kapal dan testing² atas tank² didalam kapal untuk mendapat kepastian bahwa ruang² atau tank² didalam kapal jang akan dipakai untuk memuat sesuatu barang atau barang tjair betul² memenuhi sjarat jang diperlukan suatu barang. Hal ini perlu untuk menghindarkan kerusakan atas barang jang diangkut dengan kapal laut jang akan memakan waktu lama.

DJASA² LAIN JANG DAPAT DIBERIKAN DILUAR NEGERI.

Di-negara² Eropa disamping djasa-djasa tersebut diatas djuga memberikan djasa² jang berupa:

- a. **Pengangkutan dan pengapalan.**
Pembelian² di Eropa untuk pengiriman² ke Indonesia, S.C.I. Ltd. dapat menjelenggarakan dan mengatur pengiriman² dan pengangkutan barang² jang berupa mesin² dan bahan² untuk mendirikan pabrik² dari tempat²/pabrik² dimana barang² tersebut dibuat, sampai ke-tempat² tudjuan. Djasa² ini akan berupa:
 1. Merentjanakan pengangkutan dan pengapalan
 2. Penerimaan barang dari tangan pabrik² (ex factory) atau di pelabuhan²/kapal² (FOB)
 3. Penerimaan barang² dari berbagai pabrik dipelabuhan pengapalan, hal ini apabila centralisasi dari barang² tersebut tidak diperlukan.
 4. Booking dan chartering ruangan² kapal untuk pengangkutan barang².
 5. Pindahan muatan ke-kapal² jang akan mengangkutnja ke tempat tudjuan (trans-loading).
 6. Pengaturan asuransi² untuk barang² tersebut diatas, atau untuk object keseluruhannja.

Keuntungan dari penjelenggaraan pekerdjaan tersebut bagi sipemilik barang ialah bahwa mereka akan menerima barang² tersebut dengan harga dan ongkos² lebih murah. Karena apabila hal ini diselenggarakan oleh jang mendjual barang, maka akan memasukkan njadalam harganja jang akan diperhitungkan lebih tinggi. Hal tersebut diatas djuga dapat menghemat banjak uang dengan menggabungkan pekerdjaan² booking atau chartering ruangan kapal, penjelenggaraan asuransi, perentjanaan pengapalan dan pengangkutan dan pengiriman dokumen² dapat diselenggarakan oleh satu badan sadja.

b. Pengurusan dokumen².

S.C.I. Ltd. djuga dapat menjelenggarakan pengurusan dokumen pengapalan dan dokumen² bank, mengadjukan kepada bank² untuk pembayaran. Mengirimkan dokumen² itu kepada alamat jang memerlukan dengan tepat, dan djuga mendjamin bahwa dokumen² tersebut akan diurus menurut sjarat² didalam Letter of Credit.

Pekerdjaan² tersebut akan diselenggarakan di-tempat² dimana barang² itu di kerdjakan di-gudang² dan dipelabuhan, dimana S.C.I. Ltd. mempunjai tenaga² jang dapat dipertjaja dan mengetahui adat istiadat di-tempat² tersebut sehingga pekerdjaan dapat diselenggarakan dengan memuaskan.

Pengusaha² dan pembeli² jang pandai tentu akan meminta agar barang² pembeliannja harus diperiksa terlebih dahulu sebelum barang² tersebut dikirimkan. Dan pekerdjaan pemeriksaan ini hanja akan dapat dikerdjakan dengan memuaskan hanja oleh suatu badan pemeriksa seperti S.C.I. Ltd., di mana pekerdjaan diselenggarakan dengan itikad baik dan dengan tidak memihak.

ONGKOS² PEMERIKSAAN.

Ongkos² untuk penjelenggaraan pemeriksaan tersebut diatas dapat kami adjukan kepada para peminat dengan se-ringan²nja dan dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Untuk pemeriksaan barang² pabrik atau mesin².
Ongkos² itu akan diperhitungkan dari harga barang² tersebut dan menurut permintaan² pemeriksaan jang diinginkan oleh jang berkepentingan, dengan mempertimbangkan bersarnja harga barang² tersebut, tempat² pemeriksaan dan waktu jang diperlukan untuk penjelenggaraan pemeriksaan itu.
- b. Untuk barang² hasil bumi, ongkos itu akan diperhitungkan menurut matjamnja pemeriksaan jang dikehendaki, banjaknja barang jang diperiksa, tempat barang² itu harus diperiksa

Untuk pengiriman, pengapalan dan pemin-
dahan pengapalan, akan dikenakan ongkos²
menurut apa jang berlaku untuk :

Pengangkutan dalam negeri

Pemindah pengapalan

Pengapalan

dan S.C.I. Ltd. tidak memungut biaja² untuk
administrasi, perentjanaan dan penjelengga
raan program.

S.C.I. Ltd. tidak mengadakan pemungutan
biaja² pengurusan dokumen² dalam hal pemer-
iksaan, pengapalan dan pengangkutan pro-
ject² jang diserahkan kepadanya.

PENUTUPAN KONTRAK².

Dalam perundingan² untuk mengadakan kon-
trak pembelian sejogjanjalah dan itulah waktu
ang se-baik²nja untuk menghubungi S.C.I. Ltd.
guna mendapatkan keterangan² mengenai survey.
Dan S.C.I. Ltd. akan memberikan bantuan²
untuk menjarankan bagian² mana dari project
ang harus diperiksa sebelum dikirimkan,
dan S.C.I. Ltd. akan mengadakan penawaran-
penawarannya untuk pemeriksaan jang akan
diserahkan kepadanya. Untuk ini apabila mung-
kin, akan sangat memudahkan baginja apabila
keterangan² dibawah ini dapat diberikan misal-
nja mengenai :

1. Taksiran harga mesin² atau alat² jang akan
dibeli.
2. Waktu penjerahan.
3. Nama² fihak jang berkepentingan.
4. Keterangan² teknis.

Setelah ada keterangan² tersebut diatas kemu-
dian S.C.I. Ltd. memberikan rentjana pemerik-
saan kepada fihak jang berkepentingan dan tidak
mengadakan pemungutan biaja apapun.

A L A M A T :

Untuk keperluan semua itu dapat dihubungi
pada alamat sbb. :

Superintending Company of Indonesia Ltd.

Kantor Pusat : Djalan Palatehan I Blok K. V/31
Kebajoran Baru - Telp. 70036
Alamat kawat : SUCOFINDO, Djakarta.

D J A K A R T A.

Kantor² Tjabang dan Agen² : Lihatlah daftar
terlampir.

DJAWATAN PENGAWASAN KESELAMATAN KERDJA DEPARTEMEN PERBURUHAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN NO. 1 TAHUN 1964

DARI KEPALA DJAWATAN PENGAWASAN KESELAMATAN KERDJA DEPARTEMEN
PERBURUHAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENGAKUAN ATAS DJASA-DJASA DARI
SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA LTD.

Menimbang:

1. Dengan adanya Perseroan Terbatas „SUPE-
RINTENDING COMPANY OF INDONESIA
LTD.” suatu Badan Surveyor jang didiri-
kan oleh Departemen Perdagangan Repu-
blik Indonesia sebagai perusahaan tjampuran
dengan „GENERAL SUPERINTENDENCE
COMPANY LTD.”, di Geneva, berdasarkan
naskah pendirian jang diperbuat di Djakarta
pada tanggal 22 Oktober 1956 dengan nomor
42 dihadapan Notaris J.A.L. Tobing St. Arifin
dan berkedudukan di Djakarta.
2. Bahwa Badan tersebut bergerak dilapangan
pemeriksaan, penilaian dan pengudjian atas
barang² ekspor maupun impor, termasuk djuga
mesin², pesawat², alat² perlengkapan, bahan²
dan projek² pabrik² dan perindustrian.

3. Akan kemanfaatannya suatu pemeriksaan, peni-
laian dan pengudjian atas barang² dan lain se-
bagainya tersebut jang akan diimpor, diekspor
ataupun jang langsung akan dipergunakan oleh
suatu badan baik swasta maupun pemerintah,
satu dan lain untuk melindungi fihak² jang ber-
kepentingan khususnya para consumers, pem-
beli dan pemakai, agar supaya terhindar dari
kerugian² atau kerusakan² jang mungkin dap-
at terdjadi.

Mengingat:

1. Stoemordonantie - 1930 L.N. No. 340 antara
lain artikel²: 5, 7 ayat 2, 12 ayat 3, 13 ayat 2,
14 ayat 1, 15, 21 ayat 3 dan 30.
2. Stoemverordering - 1930 L.N. No. 339 antara
lain artikel²: 8, 30, 31 ayat 1, 38 dan 45 ayat 2.
3. Veiligheids-Reglement L.N. 1910 No. 406 de-
ngan semua perubahan dan tambahannya an-

tara lain Bab II artikel dua alinea (1) ayat ayat: 5e, 7e, 8e, 9e, 20e, 22e, 23e, 24e, 27e, 33e dan 36e.

4. Peraturan khusus BB dengan P.U.I.L.-nja No. N-2004 (Peraturan² Umum untuk Instalasi² Listrik Arus-Kuat di Indonesia) antara lain:
 - a) Kata pendahuluan halaman 15 dan 19 alinea 4, 5 dan 6,
 - b) Bab 3 tentang: Mesin², pesawat², alat², perlengkapan² listrik.
 - c) Bab 4 tentang: Instalasi² penghubung dan pembagi.
 - d) Bab 5 tentang: Kabel² dan kawat² hantaran listrik.
5. Peraturan khusus C tentang: Pabrik² Gula.
6. Peraturan Khusus DD tentang: Bedjana² dan botol² badja isi hawa udara jang di-pres untuk menggerakkan mesin² diesel.
7. Peraturan Khusus EE tentang: Pabrik² dan perusahaan² dimana bahan² atau zat² jang mudah dapat menjala diolah, diatur atau dikerdjakan.
8. Peraturan khusus FF tentang: Pabrik-pabrik jang membuat dan mengpres gas-gas.
9. Peraturan khusus GG tentang: Instalasi² untuk memprojektir gambar-hidup dalam bioskop.
10. Peraturan Khusus H tentang: Pabrik² dan Perusahaan² dimana timah/timbel putih kering dimasak atau dikerdjakan.
11. Peraturan Khusus II tentang: Instalasi² untuk mengolah gas acetyleen untuk maksud² tehnik.
12. Peraturan Khusus K tentang: Pabrik² dan Perusahaan² dimana bahan² jang dapat meledek diolah, diatur, disimpan atau dikerdjakan.
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang² tentang Barang No. 1 th. 1961 tgl. 17-2-1961 Lembaran Negara Tahun 1961 No. 8 pasal 5.

Mengingat pula:

1. Setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan setjukupnja atas badan tersebut diatas;
2. Bahwa badan tersebut adalah milik dari Pemerintah Republik Indonesia sendiri.

MEMUTUSKAN :

- I. Mengakui sertipikat² pemeriksaan, penilaian dan pengudjian (inspection and testing certificates) jang dikeluarkan oleh „Superintending Company of Indonesia Ltd.” dan atau „Generale Superintendence Company Ltd.” Geneva untuk pemeriksaan², penilaian² dan pengudjian², baik jang dilakukan didalam negeri maupun diluar Negeri, jang diselenggarakan oleh Kantor² Tjabang atau perwakilannja diluar dan didalam negeri.

II. Mengakui sertipikat² pemeriksaan, penilaian dan pengudjian jang dikeluarkan oleh „Superintending Company of Indonesia Ltd.” dan General Superintendence Company Ltd.” Geneva jang menjelenggarakan pemeriksaan², penilaian² dan pengudjian² sesuai dengan ketentuan jang ditjantumkan dalam kontrak² perdjandjian pembelian beserta perintjian² blue printnja, standard² nasional jang dikeluarkan dan disahkan oleh I.S.R.I. (Institut Standar Industri Republik Indonesia) ataupun standard² Internasional jang dikeluarkan dan disjahkan oleh I.S.O., I.E.C., I.L.O., dan jang diakui dan ditundjuk dalam kontrak² dan djuga sesuai dengan ketentuan² menurut kebiasaan perdagangan internasional, jang diakui oleh Djawatan Pengawasan Keselamatan Kerdja.

III. Dengan pengertian bahwa semua pemeriksaan, penilaian dan pengudjian tersebut diatas harus dilakukan dengan tjara jang se-baik²nja dan se-teliti²nja menurut kehendak dan kemandjuaan iimiah serta ketehnikan dengan keahlian jang bermutu dengan etiket baik serta dengan tjara jang tidak memihak. Walaupun demikian pemeriksaan, penelitian dan pengudjian tersebut diatas se-kali² tidak membebaskan pihak² jang berkepentingan dari kewadajiban dan ketentuan² lainnja.

IV. Berhubung dengan pentingnja pemeriksaan, penilaian, pengudjian tersebut diatas, dipandang baik dari segi perdagangan maupun dari segi tehnik² konstruksi, pembuatan, keselamatan kerdja, pula untuk suksesnja Pembangunan Nasional Semesta Berentjana pada umumnya, dan chususnja supaja projek² dapat selesai tepat dalam waktu² jang telah ditetapkan dengan hasil djaminan:

- A. SIAP UNTUK DIDJALAN/DIGUNAKAN (BEDRIJFSKLAAR - READY FOR OPERATION),
- B. TERDJAMIN PENGGUNAAN / BEKERDJANJA (BEDRIJFSZEKER - ASSURANCE IN OPERATION)
- C. AMAN DAN SELAMAT PENGGUNAAN / BEKERDJANJA (BEDRIJFSVEILIG - SAFE DURING OPERATION).

mengandjurkan kepada jang berkepentingan untuk menggunakan djasa-djasa dari Superintending Company of Indonesia Ltd. dan General Superintendence Company Ltd. Geneva tersebut diatas.

Djakarta, 7 September 1964.

Djawatan Pengawasan Keselamatan Kerdja

Kepala

ttd.

(MILOEREDJO)

DAFTAR & ALAMAT AGEN² S.C.I. DI INDONESIA
(LIST & ADDRESSES OF S.C.I. AGENCIES IN INDONESIA)

- | | |
|--|--|
| <p>1. Superintending Co. of Indonesia Ltd.
Bandung — Agency
Djl. Asia Afrika No. 94/96
BANDUNG</p> | <p>12. Superintending Co. of Indonesia Ltd.
Djambi — Agency
Djl. Batanghari 5/Djl. Taman
DJAMBI</p> |
| <p>2. Superintending Co. of Indonesia Ltd.
Surabaya — Agency
Taman Djajengrono 1
P.O. Box 30,
SURABAJA</p> | <p>13. Superintending Co. of Indonesia Ltd.
Pangkalpinang — Agency
P.O. Box 21
PANGKALPINANG</p> |
| <p>3. Superintending Co. of Indonesia Ltd.
Semarang — Agency
Djl. R. Patah 30
P.O. Box 129
SEMARANG</p> | <p>14. Superintending Co. of Indonesia Ltd.
Tandjungpandan — Agency
Djl. Tepi Laut
TANDJUNG PANDAN</p> |
| <p>4. Superintending Co. of Indonesia Ltd.
Djl. Tjangkol 19
P.O. Box 14
TJIREBON</p> | <p>15. Superintending Co. of Indonesia Ltd.
Balikpapan — Agency
P.O. Box 6
BALIKPAPAN</p> |
| <p>5. Superintending Co. of Indonesia Ltd.
Tjilatjap — Agency
Djl. Lapangan Pelabuhan 25
TJILATJAP</p> | <p>16. Superintending Co. of Indonesia Ltd.
Bandjarmasin — Agency
Djl. Pasar Baru 35
P.O. Box 21
BANDJARMASIN</p> |
| <p>6. Superintending Co. of Indonesia Ltd.
Djl. Arau 44
P.O. Box 44
PADANG</p> | <p>17. Superintending Co. of Indonesia Ltd.
Pontianak — Agency
Djl. Rahadi Usman
PONTIANAK</p> |
| <p>7. Superintending Co. of Indonesia Ltd.
Palembang — Agency
Djl. Pasar 16 — Ilir
PALEMBANG</p> | <p>18. Superintending Co. of Indonesia Ltd.
Djl. Niaga 509
SAMARINDA</p> |
| <p>8. Superintending Co. of Indonesia Ltd.
Medan — Agency
Djl. Kebudajaan 9 (atas)
M E D A N</p> | <p>19. Superintending Co. of Indonesia Ltd.
Tarakan — Agency
Djl. Lingkas
TARAKAN</p> |
| <p>9. Superintending Co. of Indonesia Ltd.
Telokbetong — Agency
Djl. Kesatriaan 376
TELOKBETONG</p> | <p>20. Superintending Co. of Indonesia Ltd.
Djl. Pelabuhan 6
MAKASSAR</p> |
| <p>10. Superintending Co. of Indonesia Ltd.
Pakanbaru — Agency
Djl. Pelabuhan
PAKANBARU</p> | <p>21. Superintending Co. of Indonesia Ltd.
Menado — Agency
Djl. Sudirman Djaga II No. 397
P.O. Box 107
MENADO</p> |
| <p>11. Superintending Co. of Indonesia Ltd.
Rengat — Agency
Djl. Besar 235/1.
R E N G A T</p> | <p>22. Superintending Co. of Indonesia Ltd.
Sibolga — Agency
Djl. Asli/Makmur
SIBOLGA.</p> |

**PENEMPATAN SEMUA PERUSAHAAN ASING DI INDONESIA JANG TIDAK
BERSIFAT DOMESTIK DIBAWAH PENGUSAHAAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 6 TAHUN 1965**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Revolusi Indonesia sekarang telah menjapai tingkatan, jang didjiwai oleh hasrat Rakyat hendak melaksanakan prinsip, „berdiri diatas kaki sendiri” dibidang ekonomi;
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu ditinjau kembali kedudukan perusahaan² asing di Indonesia jang tidak bersifat domestik untuk disesuaikan dengan keadaan pada dewasa ini;
- c. bahwa sambil menunggu hasil penjesaaian itu perusahaan² termaksud perlu ditempatkan dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengamankan perekonomian Indonesia pada umumnja dan Perusahaan² tersebut pada khususnja;

Mengingat :

1. Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia tanggal 5 Djuli 1959;
2. Pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar;
3. Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 jo. Deklarasi Ekonomi tgl. 28 Maret 1963;
4. Amanat Presiden Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia tgl. 17 Agustus 1964 jang berdjudjul „Tahun Vivere Pericoloso” (TAVIP);
5. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara No. V/MPRS/1965 dan No. VI/MPRS/1965;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENETAPAN PRESIDEN TENTANG PENEMPATAN SEMUA PERUSAHAAN² ASING DI INDONESIA JANG TIDAK BERSIFAT DOMESTIK DIBAWAH PENGUSAHAAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1.

Dengan tidak mengurangi hak-milik jang berkepentingan, maka semua perusahaan asing di Indonesia, jang tidak bersifat domestik ditempatkan dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 2.

Dengan Surat² Keputusan Presiden Kabinet ditentukan lebih landjut perusahaan² asing termaksud pada pasal 1 manakah jang akan ditempatkan dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 3.

Pelaksanaan ketentuan² pada pasal 1 dan pasal 2 diatur lebih landjut oleh Presidium Kabinet dengan bantuan (para) Menko/Menteri jang berwenangan dilapangan-kerdja masing² perusahaan itu, dengan mengutamakan usaha² untuk mendjamin :

- a. kelantjaran pekerdjaan dalam perusahaan,
- b. keamanan dan keselamatan segenap inventari perusahaan dan
- c. hak milik pengusaha/pekerdja perusahaan.

Pasal 4.

Penjesuaian kedudukan perusahaan² asing termaksud dengan keadaan di Indonesia pada dewasa ini dilakukan oleh Presidium Kabinet dengan bantuan (para) Menko/Menteri jang bersangkutan, djika perlu dengan mendengar fihak pengusaha jang berkepentingan.

Pasal 5.

Hal² jang belum atau belum tjukup diatur dalam Penetapan Presiden ini diatur lebih landjut oleh Presidium Kabinet dengan bantuan (para) Menko/Menteri jang bersangkutan.

Pasal 6.

Ketentuan² dalam pasal-pasal jang terdahulu berlaku laku djuga bagi segenap perusahaan asing, jang telah ditempatkan dibawah penguasaan/pengurusan pengawasan Pemerintah Republik Indonesia sebelum ditetapkannja Penetapan Presiden ini.

Pasal 7.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada ha ditetapkannja.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatannja dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Djakarta

Pada tanggal : 24 April 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 24 April 1965.
SEKRETARIAT NEGARA,

t.t.d.

MOCHD. ICHSAN.

Lembaran Negara Tahun 1965 No. 3

**PENDJELASAN
ATAS
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 6 TAHUN 1965
TENTANG**

**PENEMPATAN SEMUA PERUSAHAAN ASING DI INDONESIA JANG TIDAK BERSIFAT
DOMESTIK DIBAWAH PENGUSAHAAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA.**

SUMUM.

Sebagaimana telah didjelaskan dalam Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959, jang merupakan garis² besar haluan Negara, maka Revolusi Indonesia mempunjai 3 kerangka, yakni:

- a. Membentuk Negara Kesatuan dan Negara Kebangsaan Republik Indonesia jang Demokratis dan jang berwilajah dari Sabang sampai Merauke;
- b. Membentuk suatu masjarakat jang adil dan makmur, materiil dan spirituil, dalam Negara Republik Indonesia;
- c. Membentuk suatu persahabatan jang baik antara Republik Indonesia dan semua Negara didunia dan atas dasar kerdja sama membentuk Dunia Baru, jang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menudju kepada Perdamaian Dunia jang sempurna.

„Deklarasi Ekonomi” tertanggal 28 Maret 1963 kemudian memberikan pedoman untuk pelaksanaan garis² besar haluan pembangunan dibidang ekonomi.

Dalam Amanat Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1964 jang berdjulud „Tahun Vivere Pericoloso” atau „Tavip” dinyatakan, bahwa dalam perdjangan merealisasikan kerangka Revolusi Indonesia tersebut Bangsa Indonesia telah mentjapai tingkatan:

- a. bebas dalam politik,
- b. berdiri diatas kaki sendiri dalam ekonomi dan
- c. berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk memenuhi hasrat Rakjat melaksanakan prinsip „berdiri diatas kaki sendiri” itu maka dipandang perlu untuk menindjau kembali kebidjaksanaan Pemerintah terhadap modal asing jang beroperasi dalam wilajah kekuasaan Negara Republik Indonesia dan menjesuaikan dengan panggilan zaman.

Berhubung dengan itu dan dengan mengingat Ketetapan² Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. V/MPRS/1965 dan No. VI/MPRS/1965 maka sekarang dianggap sudah tibalah saatnja untuk menempatkan semua perusahaan asing jang masih ada di Indonesia jang tidak bersifat domestik dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia.

Sambil melangsungkan fungsi perusahaan² termaksud dalam perekonomian nasional kita, maka Pemerintah menjelesaikan soal statusnja, djika perlu dengan mendengar pengusaha jang bersangkutan.

Bagi modal asing jang ingin ikut-serta dalam pembangunan Indonesia dimasa j.a.d. masih terbuka djalan² lain untuk melaksanakan keinginannja, antara lain dengan ikut-serta dalam perusahaan² berdasarkan prinsip „production sharing”.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Ketentuan ini merupakan keharusan dalam merealisasikan tjita² revolusi Indonesia setjara konsekwen.

„Jang dimaksud dengan „perusahaan asing” dalam pasal ini ialah semua perusahaan² jang modalnja untuk sebagian atau seluruhnja dimiliki oleh warga negara/badan asing dan/atau jang dalam usahannja dan kenjataanja bertudjuan untuk memindahkan keuntungannja sebagian atau seluruhnja, keluar negeri.

Dengan demikian maka perusahaan asing domestik, jang dalam usahannja dan kenjataanja tidak bertudjuan untuk memindahkan keuntungannja keluar negeri, tidak termasuk istilah „perusahaan asing” tersebut diatas.

Perusahaan² asing domestik jang demikian itu dapat melandjutkan usahannja, dengan sendirinja dengan mengindahkan haluan Negara Republik Indonesia.

Sekalipun perusahaan² asing non-domestik akan dikuasai oleh Pemerintah, namun hak-milik pengusaha jang berkepentingan tidak akan diabaikan.

Pasal 2.

Ketentuan pada pasal 1 tidak dilaksanakan setjara otomatis setelah ditetapkannja Penetapan Presiden ini.

Untuk menjegah kesimpang-siuran dalam melaksanakan ketentuan pada pasal 1 maka kepada Presidium Kabinet diberi wewenang untuk menetapkan terlebih dahulu perusahaan² asing manakah akan ditempatkan dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam pada itu dengan sendirinja diperhatikan keadaan hubungan antara Republik Indonesia dan Negara-asal pengusaha asing jang bersangkutan.

Pasal 3.

Segenap Alat Negara dan Masjarakat wadajib turut-serta mendjamin keamanan, keselamatan dan kelanjutan bekerdja perusahaan² asing jang ditempatkan dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mengamankan, menjelamatkan dan memperlantjar pekerdjaan alat² perekonomian Indonesia seluruhnja, untuk memperkokoh ketahanan Revolusi kita.

PENGUMUMAN² DEPARTEMEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

PERUBAHAN TARIF BIAJA ADMINISTRASI. GUDANG RUANG

Direktorat Pengadaan dan Penjaluran mengumumkan, bahwa tarif administrasi (Pendaftaran) gudang/ruang mengalami perubahan sebagai berikut :

a. Ruang	sebanjak	Rp. 150,—
b. Gudang luas 6 sampai 25 m ²	" "	250,—
c. " " 25 " 100 m ²	" "	1000,—
d. " " 100 " 250 m ²	" "	2600,—
e. " " 250 " 500 m ²	" "	4500,—
f. " " 500 " 1000 m ²	" "	7500,—
g. " " 1000 " 1200 m ²	" "	9750,—

1200 m² dan selebihnja harus membayar sebanjak tarif gudang diatas, ditambah dengan Rp. 1500,— untuk tiap² 100 m² dengan pembulatan keatas.

Perubahan tarip tersebut berlaku surut mulai tanggal 1 Djanuari 1965.

Tjara pembayaran biaja administrasi tersebut serta ketentuan² lain mengenai pelaksanaan pendaftaran pergudangan tetap berlaku seperti biasa menurut pengumuman Djawatan Perdagangan Dalam Negeri tanggal 8 Pebruari 1960 No. 340/HI-O/DPDN/P.

Oleh karena perubahan tarif tersebut jang berlaku surut mulai 1 Djanuari 1965, maka selisih beaja administrasi gudang/ruang jang belum disetorkan oleh pemilik/pengusaha harus disetorkan selambat²nja pada tanggal 1 Oktober 1965.—

Pelanggaran terhadap ketentuan² tersebut diatas mengenai pendaftaran gudang/ruangan ini merupakan tindak pidana ekonomi.—

Pendjelasan² djika diperlukan akan diberikan oleh Inspeksi-inspeksi Perdagangan Dalam Negeri di Ibu-Kota Propinsi/D.C.I. Djakarta Raya, Dinas Perekonomian Daerah Istimewa Jogjakarta dan Kantor² Perdagangan Dalam Negeri di Daerah².

DJAKARTA, 5 DJUNI 1965.—

PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Mengingat bahwa persediaan blanko Surat Permohonan Izin Nasional (S.P.I.N.) di Lembaga Penjaluran Perdagangan (L.P.P.) sudah habis dan penambahan tjetakan baru tidak akan diadakan lagi, maka untuk menghindarkan kema-tjetan dalam bidang pendaftaran pedagang² baru ataupun pelaksanaan mutasi. sementara oleh Direktorat Pengadaan dan Penjaluran telah ditetapkan ketentuan² sebagai berikut :

1. Dapat dipergunakan formulir S.P.I.N. berwarna lain sebagai pengganti daripada jang telah habis;
2. Djika persediaan pada Kantor² IPDN, KPDN sudah habis sama sekali, maka pembuatan/pengetikan bentuk surat permohonan diserahkan kepada pendaftaran masing²;

dengan tjatatan, supaja pada "formulir² pengganti" tersebut diberi keterangan, untuk memudahkan pembuatan lisensinja dikemudian.—

Selain daripada itu harga pendjualan formulir² jang masih tersedia, mulai tanggal 26 Mei 1965 ditetapkan sebagai berikut :

1. Formulir S.P.I.N. untuk pedagang (Nasional/Asing) dari harga Rp. 200,— dinaikkan mendjadi Rp. 400,— satu set,;
2. Formulir untuk pendaftaran pergudangan/ruangan dari Rp. 100,— dinaikkan mendjadi Rp. 200,— satu set.

DJAKARTA, 5 DJUNI 1965.—

Pasal 4.

Dalam penjesuaian status/posisi perusahaan² asing dengan situasi di Indonesia pada dewasa ini termasuk penjelesaian soal hak milik termasuk pada pasal 1, jang dilakukan oleh Pemerintah, djika perlu dengan mendengar fihak pengusaha jang berkepentingan.

Pasal 5.

Presidium Kabinet diberi wewenang untuk melengkapi ketentuan² dalam penetapan Presiden ini dan mengatur pelaksanaannja.

Pasal 6.

Untuk mentjapai keseragaman dalam pengaturan, maka Penetapan Presiden ini dinjatakan berlaku pula bagi segenap perusahaan asing jang telah ditempatkan dibawah penguasaan/pengurusan/pengawasan Pemerintah Republik Indonesia sebelum ditetapkannja peraturan ini.

Pasal 7.

Tjukup djelas (lihat uraian dibawah Penjelesaian Umum dan Pendjelasan pasal 1).

P.T. KARKAM

(P.T. KULIT ATJEH RAYA KAPTEN MARKAM)

KANTOR PUSAT : Djl. Pintubesar Selatan 97 atas Djakarta-Kota
Tilpon 23368 - 22644 - 21092
alamat kawat : KARKAM DJAKARTA

KANTOR TJABANG : M E D A N
P e k a n b a r u
D u m a i
R e n g a t
D j a m b i

KANTOR PERWAKILAN : T e m b i l a h a n
B e n g k a l i s
P a l e m b a n g
S i b o l g a

PPN P.T. KARKAM : A e r m o l e k (R i a u)
Perusahaan Remilling P.T. KARKAM : Kampung Lalang Sunggal
(Sumatra Utara)

EXPORTIR : K A R E T
K O P R A
dan hasil perkebunan lainnja

IMPORTIR : BARANG² KEPERLUAN PEMBANGUNAN
KENDARAAN²
MESIN² DIESEL
untuk berbagai matjam keperluan
MESIN² KAPAL

* * *

BANK² KAMI IALAH : BANK INDONESIA
BANK NEGARA INDONESIA
BANK DAGANG NEGARA
BANK KOPERASI TANI & NELAJAN

* * *

** Dalam rangka „banting setir” untuk „berdikari” dibidang ekonomi dan pembangunan,
P.T. KARKAM melaksanakan kegiatan²-nja semata-mata untuk membantu Pemerintah.

** Sembojan kami ”MADJU TERUS PANTANG MUNDUR” UNTUK KEMENANGAN
REVOLUSI dan UNTUK TERTJAPAINJA MASJARAKAT SOSIALIS INDONESIA.



PERKEMBANGAN HARGA KOPI DIPASARAN INTERNASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP „COFFEE EXPORT QUOTAS”

Semendjak Persetujuan Kopi 1962 mulai berlaku pada permulaan Oktober 1963 sebagai persetujuan baru diantara produsen dan konsumen, sistim djatah (quota system) langsung dilaksanakan, baik setjara tahunan, maupun setjara triwulan. Sistim djatah ini dilaksanakan berdasarkan suatu ketetapan djatah-ekspor-dasar (basic export quota) dalam Persetujuan. Atas dasar djatah-ekspor-dasar inilah ditetapkan djatah-tahunan (annual quota) oleh Dewan, jang kemudian dibagi dalam djatah-triwulanan bagi setiap negara-anggota-produsen.

Selama Pesetujuan berdjalan atas dasar perkiaraan exportable production dan konsumsi kopi dunia, selalulah terdjadi suatu „tawar-menawar persentase” untuk menetapkan djatah-tahunan didalam sidang² Dewan diantara produsen dan konsumen. Hasil „tawar-menawar” pertama adalah 99% dari djatah-ekspor-dasar merupakan djatah-tahunan 1963/64. Djatah-ekspor-dasar dalam Persetujuan adalah sebesar 45.587.183 kurang @ 60 kg sehingga djatah-tahunan 1963/64 adalah karung 1% daripadanya.

Dengan sedikit kenaikan harga kopi selama triwulan keempat 1963/64 sampai pada Djanuari 1964, diperkuat pula oleh berkurangnya taksiran exportable production oleh negara konsumen kopi terbesar terutama menurunnya produksi kopi Brazilia, dalam Pebruari 1964, atas kegesitan pihak konsumen, djatah-tahunan 1963/64 dapailah diputuskan Dewan untuk dinaikkan mendjadi 102,67% dari djatah-ekspor-dasar. Nampaklah, dengan baru hanja berdasarkan perkiraan sudah berkurang, dan kenaikan harga hanjalah insidentil, negara² konsumen dengan mudah sekali mempergunakan Persetujuan untuk memenuhi kehendaknja untuk menaikkan djatah-tahunan. Peristiwa jang sama sudah terdjadi agak beberapa kali selama tahun pertama berlakunja Persetujuan Kopi 1962.

Berlainan dengan Persetujuan² komoditas lainnja, Persetujuan Kopi 1962 belumlah mentjantumkan suatu ketentuan tegas dalam soal harga seperti suatu djangka-harga (price range), jang rupa²nja memberikan suatu kelemahan bagi sifat operatif Persetujuan itu. Dengan demikian sistim djatah didjalankan semata atas dasar perkiraan statistik supply demand kopi dunia, sebagai unsur pokok, sedangkan faktor harga hanjalah merupakan unsur „katalisator”.

Dikatakan sedemikian, karena pernah terdjadi harga jang mendadak turun jang diberi alasan oleh pihak konsumen sebagai hal „seasonal”, sedangkan perkiraan statistik malah berkurang, bukan surplus,

kentara benar betapa tidak berhasilnja para negara-produsen untuk menurunkan djatah-tahunan ekspor kopi.

Disamping sistim djatah mulai dilaksanakan sedangkan Persetujuan belumlah memuat suatu sistim „price mechanism” untuk mewudjudkan perkopian jang stabil, telah diusahakan orang pula untuk melakukan penelitian dan penjelidikan dalam hal ini. Sudah pernah di-antjer²kan suatu bentuk djangka-harga (price range) untuk tiap djenis kopi ber-sama² dengan pembentukan sematjam buffer stock seperti ketentuan² Persetujuan Timah. Tetapi, tidaklah mendapat sambutan „hangat” dari pihak konsumen, malah tegas² ditentang dengan alasan utama tidak praktis.

Sementara itu, perkembangan harga sedjak berlakunja Persetujuan dapatlah dikatakan agak stabil dengan pengertian kalaupun naik ataupun turun tidaklah begitu tajam dan tidak mentjemaskan. Pasaran sedemikian berdjalan sampai pertengahan tahun 1964. Oleh karena djatah-tahunan makin bertambah dalam Pebruari 1964, dan diiringi pula dengan tambahan djatah „shortfall” dalam Djuni 1964, mulai Djuli 1964 nampaklah gerak harga mendjudi penurunan jang terus-menerus sampai achir tahun 1964. Menurut tjatatan harga pasar New York harga Robusta per lb. dalam Maret 1964 rata² 40,78 US cent., turun mendjadi rata² 30,05 US cent. dalam Desember 1964, terus menurun lagi mendjadi rata² 28,30 dalam Djanuari 1965.



Pertumbuhan perkopian sedemikian, dalam hal posisi perkiraan supply-demand dan naik-turunnja harga kopi, selalulah dalam pemikiran negara²-pro

usen khususnja, lebih² sehubungan benar dengan
rus-menerus merosotnja harga kopi sedjak triwulan
bertama achir tahun 1964 jang lalu.

Kabarnja, pemikiran ini menemukan tempatnja
ada konperensi negara² produsen sadja, ketjuali
Indonesia, di Paris, dan sedemikian rupanja djalan
apat² tersebut sehingga mendapatkan pula djalan
luarnja. Mendjadi pemikiran utama apakah selalu
urus sedemikian „tawar-menawar” djatah dihubung-
an kepada posisi perkiraan supply-demand dan ha-
a kepada saat² harga menaik sadja.

Dengan mengambil unsur harga sebagai titik-pang-
al bertolak jang selalu dipakai oleh pihak negara²
onsumen jang kenjataannya hanja menitik-beratkan
ada harga-menaik semata, sedangkan perkembangan
harga selalu memiliki gerak naik-turun dapatlah di-
impulkan bahwa kedua peristiwa gerak itu, merupa-
an se-olah² suatu peristiwa „floating price”. Meng-
ikuti bukti gerak-gerak harga tersebut, ditjobalah kini
mengetengahkan pula suatu keharusan diadakannya
uga suatu „floating amount” bagi djatah atau supply
kopi dalam pasaran. Djatah akan bertambah bila-
ana harga menaik, sebaliknya djatah akan dikurangi
habila harga menurun.

Tjara baru ini nampaknja begitu rupa sehingga
apatlah dinamakan dengan Penjesuaian Otomatis
djatah Kopi (automatic adjustment of quotas). Dalam
sistim ini gerak otomatisnja akan dikendalikan oleh
gerak naik-turunnja harga dalam pasaran. Dengan
demikian, tentulah akan terdjadi suatu pembetulan
au penjesuaian djatah (adjustment of quotas), dan
merupakan suatu hal jang mendesak (matter of
gency).

Untuk menilai gerak naik-turun harga dalam pa-
ran, ditetapkanlah dulu suatu „indicator price” jang
rdiri dari floor dan ceiling-price. Harga pasaran
perhitungkan dengan „simple arithmetic” dari keti-
matjam kopi — Hard Arabica, — Mild Arabica,
n-Robusta.

Apabila harga pasaran dibawah atau diatas „in-
icator price” haruslah dilakukan suatu pertimbang-
-mendesak (urgent consideration) dan tentunja se-
ra pula diikuti dengan tindakan-tjepat (immediate
tion) menambah atau mengurangi djatah bagi setiap
gara² produsen/ekspor.

Sistim „automatic adjustment of quotas” jang
merupakan suatu hasil gemilang konperensi negara²
odusen Paris, sebagai suatu kebulatan pendapat,
djadikanlah dalam Sidang Dewan Kopi ke-6 di
ndon pada pertengahan Maret 1965 jang lalu.
ngan sedikit banjak mengalami pendjelasan dan
rtanjaan, Sidang telah dapat memutuskan untuk
mpergunakan sistim tersebut sebagai salah satu
putusan Sidang, jang belumlah merupakan suatu
tentuan tegas dalam Persetudjuan Kopi.

Ditetapkanlah bahwa batas penambahan dan pe-
ngurangan djatah untuk tahun-djatah 1964/65 ada-
lah sebesar 6% dari djatah-tahunan 1964/65. Untuk
waktu ini indicator price-nja diputuskan 38,00 US
cent per lb. sebagai floor price dan 44,00 US cent
per lb. sebagai ceiling price-nja. Harga pasaran di-
katakan dibawah atau diatas indicator price, bila
hari pertama harga pasaran berada dibawah floor
price dan atau diatas ceiling price dimulai diperhi-
tungkan setjara perhitungan-sederhana bagi ketiga
matjam djenis kopi itu menurut harga pasaran New
York selama 15 hari pasar ber-turut². Bilamana
harga rata² selama 15 hari itu terhitung dibawah atau
didas indicator price, Executive Board harus segera
bersidang untuk membahas dan memperbintjangkan
hal itu dan segera mengambil tindakan untuk mengu-
rangi atau menambah djatah tahunan bagi negara²
produsen/ekspor sebagai supply dalam pasaran.

Demikianlah setjara ringkas pendek maksud dan
djalannya sistim baru jang ditijptakan oleh Sidang
Dewan Kopi itu, sebagai salah satu usaha untuk
menempatkan pertumbuhan perkopian dunia jang
stabil dan berimbangan.

Setelah sistim ini diputuskan, buat pertama kalinja
harga pasar berada dibawah floor price terdjadi pada
tanggal 24 Maret 1965 dengan rata² terhitung 37,99
US cent per lb. dari ketiga djenis kopi. Mulai tanggal
itu diperhitungkanlah kenjataan harga jang terdjadi
dipasar New York untuk selama 15 hari pasar ber-
turut² yakni sampai dengan 13 April 1965. Dari
perhitungan itu diperolehlah harga rata² selama 15
hari itu dengan 38,47 US cent per lb., jang berarti
harga pasar tersebut masih berada dalam batas² in-
dicator price, jaitu diatas floor price dan dibawah
ceiling price, sehingga dengan demikian tidak me-
merlukan dilangsungkannya suatu rapat Ekecutive
Board, atau dengan perkataan lain, tidaklah memer-
lukan diadakannya suatu tindakan tjepat (immediate
action).

Setelah tanggal 13 April 1965 perkembangan harga
kopi senantiasa naik-turun dalam batas² indicator
price.

Kemudian buat kedua kalinja, pada tanggal 28
April 1965 harga djatuh lagi dibawah floor price
terhitung dengan 37,81 US cent per lb. Mulai tanggal
ini tentunja sampai tanggal 18 Mei 1965 diperhitun-
kanlah harga rata² selama 15 hari itu. Diramalkan
orang, berkemungkinan sekali perhitungan harga
rata² 15 hari kedua kali ini akan menghasilkan suatu
harga jang berada dibawah floor price, sehingga akan
dilaksanakanlah suatu penjesuaian djatah ekspor bagi
negara² ekspor.

(Laporan dari KBRI di London).

S J A R A T² P E N E R B I T A N R E S M I
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA
No. : 51/SK/M/65.

**MENTERI PENERANGAN REPUBLIK
INDONESIA**

Menimbang :

Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 6 ayat (1) Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 29/SK/M/65, maka perlu segera ditetapkan pengaturan mengenai penerbitan Dinas Pemerintah, organ² Partai Politik, Golongan Karja/Ormas², organ² Lembaga ke-Agamaan dan Badan² Sosial;

Mengingat :

Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 29/SK/M/65, tentang Norma² Pokok Pengusahaan Pers;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Norma² Pokok Pengusahaan Pers bagi penerbitan Dinas Pemerintah, organ² Partai Politik, Golongan Karja/Ormas², organ², Lembaga ke-Agamaan dan Badan Sosial sebagai berikut :

BAB I

Landasan idiil, fasilitas, prosedur peridzinan, pertanggung jawaban djawab, pentjabutan idzin terbit dan ketentuan peralihan.

Pasal 1.

Pengertian mengenai pers didalam Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 29/SK/M/65 lebih lanjut diartikan dan disebut penerbitan Resmi didalam Surat Keputusan ini.

Pasal 2.

Ketentuan² tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan No. 29/SK/M/65 Bab I pasal 1, Bab III pasal 8, Bab IV pasal 9 dan 10, Bab V pasal 12 dan 13, Bab VI pasal 14, Bab VII pasal 15 berlaku seluruhnja bagi Penerbitan Resmi Dinas² Pemerintah, Partai² Politik, Golongan² Karja/Ormas², Lembaga² ke-Agamaan dan Badan² Sosial.

BAB II.

Pengusahaan Penerbitan Resmi.

Pasal 3.

Syarat² penerbitan resmi :

- (1) Mengenai Penerbitan Dinas Pemerintah harus ada keputusan dari Menteri yang bersangkutan, yang menjaakan urgensinja penerbitan termasuk.
- (2) Mengenai penerbitan diluar Dinas Pemerintah harus ada keputusan resmi dari Pimpinan Tertinggi Partai Politik, Golongan Karja/Ormas², Lembaga ke-Agamaan dan Badan Sosial yang bersangkutan tentang urgensi penerbitan termasuk, dengan disertai salinan Anggaran Dasar dari masing² Badan yang bersangkutan.

- (3) Pimpinan Redaksi/Penanggung-djawab harus ditundjuk oleh yang tersebut ayat (1) atau ayat (2) pasal ini, berdasarkan kewenangannya masing², dengan dilampiri riwayat-hidupnja yang diserahkan oleh Pimpinan Departemen Organisasi yang bersangkutan.



- (4) Dibidang pengusahaannya harus mendaftarkan kepada SPS OPS Pers, mengingat Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. No. 12a/SK/M/65 Pasal 1 dan 2 tentang semua badan penerbitan surat² kabar/Madجالah tanpa pengetjuaian dan wadajibkan mendjadi anggota/anggota-peserta SPS-OPS Pers.

BAB III.

Periode Terbit.

Pasal 4.

Periode penerbitan yang dimaksudkan dalam Surat Keputusan ini ditentukan oleh Menteri Penerangan setelah menerima permohonan dari yang bersangkutan, berdasarkan pertimbangan kedajugunaanja.

BAB IV.

Ketentuan Penutup.

Pasal 5.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 Djuni 1965.

MENTERI PENERANGAN R

t.d.

A C H M A D I

Major Djenderal T.N.I.

PENERBITAN MADJALAH DAN BERKALA LAINNJA SEBAGAI MEDIA RESMI DARI DEPARTEMEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN URUSAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI KOMPARTIMEN LUAR NEGERI/ H.E.L.N. DAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI !

Surat Keputusan Bersama Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri.

No. : 018/4/MPLN/SKB/65 tgl. 9-4-1965
007/MPDN/SKB/65

KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAN MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI,

MENIMBANG :

1. bahwa dalam rangka usaha memajukan perdagangan dalam dan luar negeri, dianggap perlu untuk memberikan penerangan dan penjelasan kepada dunia perdagangan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya dengan tjara antara lain menerbitkan madjalah dan publikasi berkala lainnja sebagai media resmi Departemen Perdagangan Dalam Negeri dan Urusan Perdagangan Luar Negeri Kompartimen Luar Negeri/ Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri;
2. bahwa dalam rangka berdiri diatas kaki sendiri ("self reliance"), usaha penerbitan-penerbitan tersebut diatas dilaksanakan tanpa membebani Anggaran Belandja Negara.

MENINGAT :

1. Surat Keputusan Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri No. 001/3/MPLN/SK/65 tanggal 15 Maret 1965;
2. Surat Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri tanggal 9 April 1965 No. 016/4/MPLN/SK/65 tentang Susunan dan Organisasi Direktorat Marketing dan Research.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

Pertama :

Menerbitkan madjalah dan publikasi berkala lainnja sebagai media resmi Departemen Perda-

gangan Dalam Negeri dan Urusan Perdagangan Luar Negeri Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.

Kedua :

Menugaskan penjelenggaraan usaha penerbitan-penerbitan tersebut dalam "PERTAMA" kepada Direktorat Marketing dan Research.

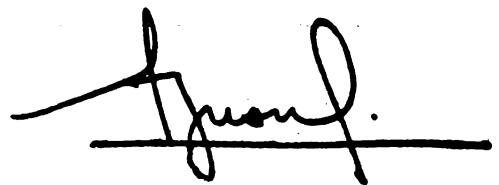
Ketiga :

Usaha penerbitan tersebut diselenggarakan sebagai suatu usaha jang berdiri diatas kaki sendiri ("self reliance") dan tidak membebani Anggaran Belandja Negara.

Keempat :

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**MENTERI PERDAGANGAN
DALAM NEGERI/KUASA
MENTERI PERDAGANGAN
LUAR NEGERI,**



A. J U S U F

(Brig. Djendral T.N.I.)

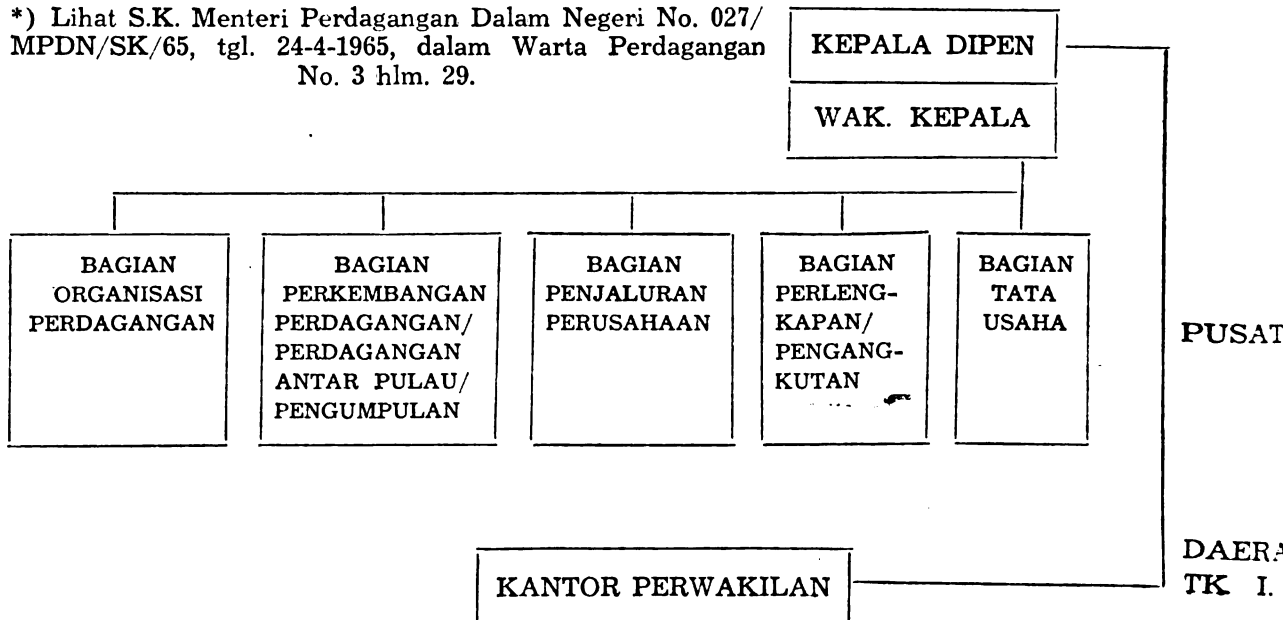
**NAMA' KEPALA, WAKIL KEPALA, KEPALA BAGIAN DAN KEPALA-KEPALA SEKSI DAN
DIREKTORAT-DIREKTORAT DAN SEKUM DALAM LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

I. DIREKTORAT PENGADAAN DAN PENJALURAN:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Kepala Direktorat | : Drs. Sjaaf Muchtar |
| 2. Wakil Kepala Direktorat | : J.A.H. Goni |
| 3. Kepala Bagian Tata Usaha | : O. Wirapermana |
| 4. Kepala Seksi Umum dan Rumah Tangga | : B. Sugito |
| 5. Kepala Seksi Keuangan | : R. Saliman |
| 6. Kepala Seksi Dokumentasi Umum | : Drs. A. Bustami |
| 7. Kepala Bagian Perlengkapan Pengangkutan | : Iton Wilachsa (Sementara) |
| 8. Kepala Seksi Bahan ² Pokok | : Zainal Jusuf |
| 9. Kepala Seksi Angkutan | : Soedardjo |
| 10. Kepala Seksi Barang ² Bangunan/Tehnik/Grafika | : R. Djuri |
| 11. Kepala Seksi Perkembangan Bidang Perlengkapan
Barang-barang | : Suis Sastromihardjo |
| 12. Kepala Bagian Penjaluran Perusahaan | : Iim Rochimat B.A. |
| 13. Kepala Seksi Peridzinan Perusahaan Perdagangan | : Sumarlianto S.H. |
| 14. Kepala Seksi Pembatasan Perusahaan | : Sarwono |
| 15. Kepala Seksi Pendaftaran Pergudangan | : Suhandi |
| 16. Kepala Bagian Perkembangan Perdagangan/Perdagangan
Antar Pulau/Perdagangan Pengumpulan | : Drs. St. M. Sjah |
| 17. Kepala Seksi Perdagangan Antar Pulau | : M.L. Tobing |
| 18. Kepala Seksi Perkembangan Perdagangan | : Hardjo Utomo |
| 19. Kepala Seksi Perdagangan Pengumpulan | : R. Supandi Darmaatmadja |
| 20. Kepala Bagian Organisasi Perdagangan | : Suratno |
| 21. Kepala Seksi Penelitian dan Perdagangan | : Alhilal Aliutomo B.Sc. |
| 22. Kepala Seksi Bimbingan dan Pengawasan | : Djamaludin Thahir S.H. |

**ORGANISASI DAN SUSUNAN DIREKTORAT
PENGADAAN DAN PENJALURAN *)**

*) Lihat S.K. Menteri Perdagangan Dalam Negeri No. 027/MPDN/SK/65, tgl. 24-4-1965, dalam Warta Perdagangan No. 3 hlm. 29.



II. DIREKTORAT METROLOGIE:

1. **Kepala Direktorat** : Soehardjo
2. **Kepala Bagian Teknik** : Martojo
3. **Kepala Seksi Inventarisasi/Dokumentasi/Perpustakaan/Penerangan** : Asep Rachman
4. **Kepala Seksi Kamar Gambar** : Ekam Sutarma
5. **Kepala Seksi Perlengkapan** : A. Kosasih
6. **Kepala Seksi Perbengkelan** : Moh. Salim
7. **Kepala Bagian Pendidikan** : J. Sumardi
8. **Kepala Projek Akademi Metrologie** : J. Sumardi (dirangkap dengan Kepala Bagian Pendidikan)
9. **Kepala Seksi Pendidikan/Latihan** : Akan ditentukan kemudian.
10. **Kepala Seksi Asrama** : Akan ditentukan kemudian.
11. **Kepala Lembaga Ukur** : Gusti Made Putera
12. **Kepala Seksi Ukuran Pandjang/Massa** : Akan ditentukan kemudian.
13. **Kepala Seksi Interferometri/Mekanika terpakai Elektronis** : Akan ditentukan kemudian.
14. **Kepala Bagian Tata Usaha** : Surasto Hadi Sumarno
15. **Kepala Seksi Keuangan** : A. Sapoetra
16. **Kepala Seksi Arsip/Ekspedisi** : Djukardi
17. **Kepala Seksi Kesedjahteraan Pegawai** : Koesdjan
18. **Kepala Perwakilan Direktorat Metrologie pada Departemen Perdagangan Dalam Negeri** : Moh. Affandi

III. DIREKTORAT HARGA:

1. **Kepala Direktorat** : Drs. Moh. Ibrahim
2. **Wakil Kepala Direktorat** : M. Sumadyo M.A.
3. **Kepala Bagian Harga/Tarip** : Djoechrony
4. **Kepala Seksi Tarip Djasa** : R. Ng. Tjondromopranoto (Soemarsono)
5. **Kepala Seksi Harga** : Moh. Daud Mahruf
6. **Kepala Seksi Khusus** : Bachdar Sjamsi Ojong
7. **Kepala Bagian Penjelidikan/Dokumentasi** : Drs. Sofjan Boedjang
8. **Kepala Seksi Penjelidikan/Laporan** : Poniman Djasman
9. **Kepala Seksi Statistik/Dokumentasi** : Soedibjo
10. **Kepala Bagian Tata Usaha** : K.A. Pattinama
11. **Kepala Seksi Keuangan** : Resai
12. **Kepala Seksi Arsip** : J.J. Leimena
13. **Kepala Seksi Tik** : Mardjuki
14. **Kepala Seksi Rumah Tangga** : Moh. Noor Djunaidi
15. **Kepala Seksi Pengiriman** : Ohim

IV. DIREKTORAT ADMINISTRASI:

1. **Kepala Direktorat** : Budhiman B.A.
2. **Wakil Kepala Direktorat** : M. Deroen
3. **Kepala Bagian Pegawai** : Drs. Wendel Djatti
4. **Kepala Sub. Bagian Perdagangan Dalam Negeri** : S.W. Soetardjo
5. **Kepala Sub. Bagian Perdagangan Luar Negeri** : S. Marsoedi
6. **Kepala Bagian Keuangan** : Sukmohadi
7. **Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga** : Dwidjosiswojo
8. **Kepala Bagian Pengawasan Keuangan** : Mulani bin Muslim
9. **Kepala Bagian Latihan dan Pendidikan** : Sulaeman Kartasoemitra S.H.

V. SEKRETARIAT UMUM:

1. **Kepala Sekretariat Umum** : Soenarjono B.A.
2. **Kepala Bagian Sekretariat** : Sukidi B.A.
3. **Kepala Seksi Umum** : Suprajitno
4. **Kepala Seksi Khusus** : Drs. Mudjiono
5. **Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi** : Soekiman Hs.
6. **Kepala Seksi Arsip** : Soekiman Hs.
7. **Kepala Seksi Tik/Ekspedisi** : Sutrisno
8. **Kepala Bagian Kesedjahteraan Pegawai** : Kajoebi B.A.
9. **Kepala Seksi Rekreasi dan Kesehatan** : J. Irnowo
10. **Kepala Seksi Distribusi** : Suhargo Pudjowijono
11. **Kepala Seksi Sosial** : T.B. Sukmara

DJASA-DJASA

PENGUMUMAN

BIRO LALU LINTAS DEvisa No: 7/Inv/BLLD/65. tgl. 31-5-'65

Oleh karena ternyata bahwa mengenai beberapa hal tersebut pada Pengumuman B.L.L.D. no. 3 Inv/BLLD/65 tgl. 9 Pebruari 1965 terdapat bermacam-macam interpretasi, maka bersama ini kami berikan penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

1. Valuta asing yang diterima sebagai pembayaran atas djasa-djasa yang diberikan kepada luar negeri oleh :
 - a. maskapai² pener- : harus disetorkan pada rekening valuta asing pada Bank Devisa. Perintjian bangunan/perkapalan perhitungan atas beban rekening ini (20%—80% atau 100%) ditentukan oleh B.L.L.D. a.l. dengan memperhatikan Pengumuman B.L.L.D. no. 5/Inv/BLLD/65 tgl. 3 April 1965.
 - b. maskapai² asuransi : harus disetorkan pada rekening valuta asing pada Bank Devisa. Penguna (baik dari peneri- an dari rekening ini (baik untuk konversi maupun untuk transfér) ditentukan oleh B.L.L.D. Dalam hubungan ini perlu diterangkan bahwa yang berwenang pun premi mau- oleh B.L.L.D. Dalam hubungan ini perlu diterangkan bahwa yang berwenang pun komisi) menentukan siapa yang boleh berusaha dalam lapangan perasuransian dan dengan sjarat² apa, adalah Departemen Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan dan bukan B.L.L.D. B.L.L.D. hanya menentukan aspek² devisa, djika suatu perusahaan asuransi telah diperkenankan berusaha.
 - c. Hotel Indonesia dan hotel² lainnja yang : harus disetorkan pada rekening valuta asing pada akan ditetapkan lebih landjut. Bank Indonesia.
 - d. Perusahaan² dan badan² dilingkungan : 50% diserahkan kepada Dana Devisa (D.D). Departemen Perhubungan Laut, selainnja 50% Devisa Pelengkap (D.P.). maskapai pelajaran, jaitu P.N. Pelabuhan dan P.N. Angkasa Pura Kemajoran serta perusahaan² lain yang akan ditetapkan kemudian.
 - e. Kantor survey : 50% diserahkan kepada Dana Devisa (D.D.) (misalkan Super- 50% Devisa Pelengkap (D.P.) Jang dimaksudkan dengan "survey" adalah intending Co.) pemeriksaan kualitas dan kwantitas barang ekspor dan impor dan bukannya geological (mining) survey buat membikin peta dsb.
2. P.N. Nitour dan Bipalindo dibebaskan dari kewadajiban untuk menjerahkan devisa kepada Dana Devisa (100% D.P.) dengan tjatatan, bahwa yang harus diperhitungkan oleh P.N. Nitour atas dasar 100% Devisa Pelengkap adalah 100% dari "net-income" P.N. Nitour, jaitu setelah dikurangkan pembayaran-pembayaran dalam valuta asing untuk kepentingan tourist² kepada maskapai² perkapalan penerbangan, hotel dsb-nja. Apabila perhitungan tersebut tidak dapat dilakukan dengan segera, maka valuta asing yang bersangkutan hendaknja dipindahkan kerekening valuta asing P.N. Nitour pada Bank Indonesia Djakarta.
3. Semua transfer yang dimaksudkan untuk mengganti ongkos² kantor perwakilan yang telah dikeluarkan dalam Rupiah, diperhitungkan atas dasar :

20% kurs D.D. — 80% kurs D.P.

Untuk mempermudah penjelesaiannya, maka semua transfer melalui Bank² Devisa yang ditunjukkan kepada :

- I. 1. badan hukum dan warga negara Indonesia yang mewakili perusahaan asing di Indonesia.
2. kantor² tjabang, filial², branch offices, representative's offices dan perorangan warga negara asing yang bertindak sebagai wakil dari perusahaan² asing diluar negeri baik yang mempunyai penghasilan dalam mata uang Rupiah harus diperhitungkan oleh Bank Devisa yang bersangkutan atas dasar :

20% kurs Dana Devisa. — 80% kurs Devisa Pelengkap.

Ketentuan ini berlaku terhadap semua transfer² tersebut diatas mulai tgl. 28 Desember '65, sekedar valuta asing dikreditir pada koresponden bank² devisa diluar negeri mulai tgl. 1 Djanuari 1965.

3. Perusahaan minjak asing di Indonesia sesuai dengan Pengumuman B.L.L.D. no. 3/DP/BLLD/65 diperhitungkan atas dasar kurs 1US. \$ = Rp. 520.—

Djuga untuk transfer² yang ditudjukan kepada perwakilan² asing, badan² Internasional serta pegawai²nja yang berkewarganegaraan asing diperhitungkan atas dasar kurs 1 US. \$. = Rp. 520.—

- II. Perhitungan atas dasar 100% D.P. hanja dapat dilakukan dengan persetujuan Biro jaitu a.l. untuk upah, honorarium perwakilan² perdagangan (tidak termasuk komisi perusahaan² asuransi dan perkapalan).
- III. A. Gadji orang asing yang berada di Indonesia sebagai wakil perusahaan asing dianggap djuga sebagai ongkos kantor yang harus dimasukkan dalam rentjana Anggaran Belandja yang harus disampaikan kepada B.L.L.D., sehingga konversi valuta asing untuk wakil² termaksud diatas harus dilakukan djuga atas dasar :

20% kurs D.D. 80% kurs D.P.

Apabila transfer ongkos² dimaksudkan hanja untuk satu bulan sadja, maka valuta asing tersebut harus segera dikoonversi oleh bank devisa atas dasar 20% D.D. — 80% D.P., sedangkan dalam hal transfer itu merupakan lumpsom untuk lebih dari satu bulan, maka atas permintaan yang bersangkutan djumlah valuta asing yang diterima dapat dimasukkan ke rekening valuta asing atas nama yang bersangkutan pada Bank Devisa. Penggunaan dari rekening valuta asing tersebut harus disesuaikan dengan sjarat² sebagai berikut :

1. transfer keluar negeri tidak diperkenakan.
2. valuta asing yang telah ditukarkan kedalam mata uang Rupiah tidak dapat dikonversi lagi ke valuta asing.
3. penukaran untuk ongkos² kantor perwakilan asing dilakukan atas dasar 20% kurs D.D. — 80% kurs D.P.
4. tiap pendjualan dari bagian 80% D.P. dikenakan retribusi untuk B.L.L.D. yang banjknja $1^{0/100}$ (satu pro mille) dari djumlah D.P. yang dipindah tangankan.

B. Penukaran atas dasar 100% D.P. hanja dapat dilakukan oleh pengundjung² warga negara asing sekedar tidak merupakan perwakilan diplomatik dan konsuler asing, badan² internasional seperti termaksud dalam Pengumuman B.L.L.D. No. 1/DP/BLLD/65 tgl. 20 Pebruari 1965, yang memiliki short-visitors jaitu visa yang berlaku tidak melebihi dari 3 bulan.

- IV. A. Bagian² dari transfer valuta asing yang harus diserahkan kepada Dana Devisa seperti termaksud dalam sub I B, sub I C ke-3, sub II dan III dari Pengumuman kami no. 3/Inv/BLLD/65 tanggal 9 Pebruari 1965 harus diperhitungkan oleh Bank² Devisa atas dasar nilai transaksi Rupiah jaitu US. \$. 1 = Rp. 250,— (N. T. R.).

Tjontoh :

Transfer sebesar US. \$. 1000,— untuk suatu kantor tjabang dari perusahaan asing harus diperhitungkan atas dasar :

80%	= 300 × Rp. 4000 (apabila kurs pembelian devisa pelengkap untuk 1 US. \$. = Rp. 4000,—)	: Rp. 3.200.000,—
20%	= 200 × Rp. 250 (buying rate/kurs transaksi-Bank beli "K.T.B. b.")	: Rp. 50.000,—

Total : Rp. 3.250.000,—

- B. Valuta asing yang berdasar ketentuan² dalam Pengumuman no. 3/Inv/BLLD/65 serta perubahan²/tambahan²nja tidak wadajib diserahkan kepada Dana Devisa yang diperoleh sebagai pembayaran :
- a. pendjualan barang² bergerak atau tidak bergerak yang tetap berada di wilayah Indonesia (bukan ekspor/sepandjang tidak wadajib diserahkan kepada Dana Devisa di-tata usahakan sebagai devisa pelengkap B.
 - b. untuk ongkos² pengangkutan : ke rekening valuta asing atas nama maskapai pengangkutan yang bersangkutan.
 - c. untuk djasa² lainnja : ke rekening D.P.—A.

**PIMPINAN
BIRO LALU LINTAS DEvisa
DIREKTORIUM,**

R.A. Kartadjoemena. Martojo Koento.

PENETAPAN HARGA PENJERAHAN BARANG² EKSPOR GOLONGAN II

NO. 31/HP/65.

BERLAKU DARI TGL. 7 s.d 19 DJUNI 1965.

1. **COPAL MALENGAKET Per Kwintal.**

kwaliteit P.W.S. Nf.	90,—
kwaliteit M A P. Nf.	77,—
kwaliteit W.S. Nf.	80,—
kwaliteit W.S. (Batjan) Nf.	65,—
kwaliteit L.A.S. Nf.	38,—
kwaliteit M.A. Nf.	25,—
kwaliteit M.B. Nf.	19,—

2. **COPAL LOBA Per Kwintal.**

kwaliteit A Nf.	88,—
kwaliteit B Nf.	79,—
kwaliteit C. 1. Nf.	75,—
kwaliteit C. 2. Nf.	66,—
kwaliteit D Nf.	61,—
kwaliteit D.B.B. Nf.	57,—
kwaliteit E Nf.	53,—
kwaliteit I Nf.	48,—
kwaliteit Dust Nf.	13,—

3. **KULIT KERBAU Intermediate Per Kwintal.**

berat 8 — 10 kg DM.	200,—
berat 10 — 13 kg DM.	204,—
berat 13 — 16 kg DM.	210,—
berat 16 — 20 kg DM.	218,—
berat 20 — up DM.	222,—

4. **KULIT KERBAU Second Per Kwintal.**

berat 8 — 10 kg DM.	140,—
berat 10 — 13 kg DM.	142,—
berat 13 — 16 kg DM.	147,—
berat 16 — 20 kg DM.	152,—
berat 20 — up DM.	155,—

5. **KULIT KERBAU Pickers Per Kwintal.**

berat 8 — 10 kg DM.	113,—
berat 10 — 13 kg DM.	117,—
berat 13 — 16 kg DM.	123,—
berat 16 — 20 kg DM.	131,—
berat 20 — up DM.	139,—

6. **KULIT KAMBING Ukuran 70 — 100 cm First Per Lembar.**

berat average 34 kg (per 100 lembar) Br. pence	54
berat average 37 kg (per 100 lembar) Br. pence	57
berat average 40 kg (per 100 lembar) Br. pence	60
berat average 50 kg (per 100 lembar) Br. pence	70
berat average 60 kg (per 100 lembar) Br. pence	80
berat average 65 kg (per 100 lembar) Br. pence	85
berat average 70 kg (per 100 lembar) Br. pence	90

7. **KULIT KAMBING Ukuran 70 — 100 cm Seconds Per Lembar.**

berat average 34 kg (per 100 lembar) Br. pence	40½
berat average 37 kg (per 100 lembar) Br. pence	42¾
berat average 40 kg (per 100 lembar) Br. pence	45
berat average 50 kg (per 100 lembar) Br. pence	52½
berat average 60 kg (per 100 lembar) Br. pence	60
berat average 65 kg (per 100 lembar) Br. pence	63¾
berat average 70 kg (per 100 lembar) Br. pence	67½

8. **KULIT GIBAS Ukuran 70 — 100 cm First Per Lembar.**

berat average 50 kg (per 100 lembar) Br. pence	50
berat average 60 kg (per 100 lembar) Br. pence	60
berat average 70 kg (per 100 lembar) Br. pence	70

9. **KULIT GIBAS Ukuran 70 — 100 cm Seconds Per Lembar.**

berat average 50 kg (per 100 lembar) Br. pence	37½
berat average 60 kg (per 100 lembar) Br. pence	45
berat average 70 kg (per 100 lembar) Br. pence	52½

10. **KOPI ROBUSTA Per Kg.**

EK. I DM.	1.11
EK. II DM.	1.05
EK. III DM.	1.01
20/25% DM.	0.99
AP. I DM.	1.14
AP. II DM.	1.00
GB 10/12% DM.	1.01
JAVA W.I.B./I DM.	1.62

11. **KOPI ARABICA Per Kg.**

Sumatera/Sibolga D.P. DM.	2.73
Java W.I.B./I DM.	3.52
Java W.I.B./SUP. DM.	3.70
Sulawesi Rantepao D.P. DM.	3.38
Sulawesi Kalosi D.P. DM.	3.78
Sulawesi Rantepao Triage DM.	2.02
Sulawesi Kalosi Triage DM.	2.27

12. **PALA KUPAS Per Kwintal.**

Siauw ABCD DM.	440,—
Siauw Rimpel DM.	410,—
Siauw BWP DM.	331,—
Papua ABC DM.	338,—
Papua BWP DM.	277,—

13. **PALA KUPAS Bukan Banda Bukan Siauw Per Kwintal.**

ABCD DM.	418,—
Rimpel DM.	390,—
BWP. DM.	315,—

14. **PALA PADANG BIDJO SARING Per Kwintal** US\$. 90,—

15. **PALA PADANG Per Kwintal** US\$. 47,—

16. **BUNGA PALA Per Kwintal**

Siauw I DM.	550,—
Siauw Gruis I DM.	528,—
Siauw II DM.	508,—
Siauw Gruis II DM.	486,—
Papua I DM.	395,—
Papua Gruis I DM.	378,—
Papua II DM.	360,—
Papua Gruis II DM.	346,—

17. **VANILI Per Kg.**

kwaliteit ABC US\$.	5.79
kwaliteit cuttings US\$.	4.99
kwaliteit loose-cuts US\$.	4.99

18. **COPRA CAKES/CHIPS Per Kwintal (Kadar Minyak Max. 15%).**

copra cakes DM.	13,—
copra chips DM.	14,—
ground telquel chips/cakes DM.	13,—

19. **MINJAK ETERIS Per Lb.**

minjak sereh minimum 85/35% Br. pence	39
minjak nilam kwaliteit I Br. pence	15
minjak nilam kwaliteit II Br. pence	14
minjak cananga ester 20 up Br. pence	17
minjak akar wangi E. £.	1/17/-

Bersambung ke hal 4

**PENETAPAN HARGA PENJERAHAN BARANG² EKSPOR GOL. II.
NO. 31 A/HP/65.**

Berlaku dari tgl. 7 s/d 19 Djuni 1965.

	Tudjuan :			Tudjuan :	
	Eropa	Hongkong		Eropa	Hongkong
1. Rotan pulut merah W & S per kwintal.					
kwaliteit I ukuran 3/5	DM. 75,—	HK\$. 128,—			
kwaliteit II ukuran 3/5	DM. 50,—	HK\$. 99,—			
kwaliteit III ukuran 3/5	DM. 23,—	HK\$. 38,—			
2. Rotan pulut merah unwashed per kwintal.					
kwaliteit I ukuran 3/5	—	HK\$. 125,—			
kwaliteit II ukuran 3/5	—	HK\$. 97,—			
kwaliteit III ukuran 3/5	—	HK\$. 37,—			
3. Rotan puluh putih W & S per kwintal.					
kwaliteit I ukuran 3/5	DM. 50,—	HK\$. 85,—			
kwaliteit II ukuran 3/5	DM. 18,—	HK\$. 35,—			
kwaliteit III ukuran 3/5	DM. 15,—	HK\$. 25,—			
4. Rotan pulut putih unwashed per kwintal.					
kwaliteit I ukuran 3/5	—	HK\$. 82,—			
kwaliteit II ukuran 3/5	—	HK\$. 32,—			
kwaliteit III ukuran 3/5	—	HK\$. 24,—			
5. Rotan sega W & S per kwintal					
kwaliteit I ukuran 4/11	DM. 80,—	HK\$. 142,—			
kwaliteit II ukuran 4/11	DM. 60,—	HK\$. 99,—			
kwaliteit III ukuran 4/11	DM. 35,—	HK\$. 64,—			
6. Rotan sega unwashed per kwintal.					
kwaliteit I ukuran 4/11	—	HK\$. 139,—			
kwaliteit II ukuran 4/11	—	HK\$. 97,—			
kwaliteit III ukuran 4/11	—	HK\$. 61,—			
7. Rotan djahab W & S per kwintal.					
kwaliteit I ukuran 8/11	DM. 60,—	HK\$. 199,—			
kwaliteit II ukuran 8/11	DM. 48,—	HK\$. 78,—			
kwaliteit halfhard ukuran 8/11	DM. 38,—	HK\$. 64,—			
kwaliteit III ukuran 8/11	DM. 30,—	HK\$. 57,—			
kwaliteit IV ukuran 8/11	DM. 20,—	HK\$. 42,—			
kwaliteit IV ukuran 4/8	DM. 27,—	HK\$. 52,—			
Rotan djahab unwashed per kwintal.					
kwaliteit I ukuran 8/11	—	HK\$. 97,—			
kwaliteit II ukuran 8/11	—	HK\$. 75,—			
kwaliteit halfhard ukuran 8/11	—	HK\$. 61,—			
kwaliteit III ukuran 8/11	—	HK\$. 54,—			
kwaliteit IV ukuran 8/11	—	HK\$. 39,—			
kwaliteit IV ukuran 4/8	—	HK\$. 52,—			
Rotan kooboo soft W & S per kwintal					
kwaliteit II ukuran 8/11	DM. 25,—	HK\$. 45,—			
kwaliteit III ukuran 8/11	DM. 15,—	HK\$. 29,—			
kwaliteit III ukuran 4/8	DM. 23,—	HK\$. 39,—			
Rotan kooboo soft unwashed per kwintal.					
kwaliteit II ukuran 8/11	—	HK\$. 42,—			
kwaliteit III ukuran 8/11	—	HK\$. 27,—			
kwaliteit III ukuran 4/8	—	HK\$. 37,—			
Rotan kooboo soft W & S per kwintal.					
kwaliteit halfhard ukuran 4/8	DM. 35,—	HK\$. 69,—			
12. Rotan kooboo soft unwashed per kwintal.					
kwaliteit halfhard ukuran 4/8	—	HK\$. 49,—			
13. Rotan tolakan (ex Kalimantan)					
	—	HK\$. 21,—			
14. Rotan tohiti W & S per kwintal.					
kwaliteit I ukuran 18/24	DM. 60,—	HK\$. 99,—			
kwaliteit II ukuran 18/24	DM. 55,—	HK\$. 92,—			
kwaliteit IIB ukuran 18/24	DM. 50,—	HK\$. 85,—			
kwaliteit III ukuran 18/24	DM. 44,—	HK\$. 77,—			
kwaliteit IIIB ukuran 18/24	DM. 32,—	HK\$. 59,—			
kwaliteit IV ukuran 18/24	DM. 20,—	HK\$. 42,—			
kwaliteit IV B ukuran 18/24	DM. 18,—	HK\$. 32,—			
kwaliteit V ukuran 18/24	DM. 14,—	HK\$. 25,—			
kwaliteit V ukuran 10/18	DM. 11,—	HK\$. 19,—			
15. Rotan tohiti unwashed per kwintal.					
kwaliteit I ukuran 18/24	—	HK\$. 97,—			
kwaliteit II ukuran 18/24	—	HK\$. 89,—			
kwaliteit IIB ukuran 18/24	—	HK\$. 82,—			
kwaliteit III ukuran 18/24	—	HK\$. 74,—			
kwaliteit III/B ukuran 18/24	—	HK\$. 57,—			
kwaliteit IV ukuran 18/24	—	HK\$. 39,—			
kwaliteit IV/B ukuran 18/24	—	HK\$. 29,—			
kwaliteit V ukuran 18/24	—	HK\$. 22,—			
16. Rotan Anduru W & S per kwintal.					
kwaliteit I ukuran 4/8	DM. 26,—	HK\$. 51,—			
kwaliteit II ukuran 4/8	DM. 20,—	HK\$. 30,—			
kwaliteit III ukuran 4/8	DM. 14,—	HK\$. 27,—			
17. Rotan Anduru Unwashed per kwintal.					
kwaliteit I ukuran 4/8	—	HK\$. 48,—			
kwaliteit II ukuran 4/8	—	HK\$. 37,—			
kwaliteit III ukuran 4/8	—	HK\$. 24,—			
18. Rotan Lita W & S per kwintal.					
kwaliteit I ukuran 8/11	DM. 10,—	HK\$. 27,—			
kwaliteit II ukuran 8/11	DM. 8,—	HK\$. 17,—			
19. Rotan Lita Unwashed per kwintal.					
kwaliteit I ukuran 8/11	—	HK\$. 24,—			
kwaliteit II ukuran 8/11	—	HK\$. 14,—			
20. Rotan Datuk Merah W & S per kwintal.					
kwaliteit I ukuran 4/8	DM. 50,—	HK\$. 85,—			
kwaliteit II ukuran 4/8	DM. 38,—	HK\$. 62,—			
kwaliteit III ukuran 4/8	DM. 28,—	HK\$. 48,—			
kwaliteit IV ukuran 4/8	DM. 10,—	HK\$. 19,—			
21. Rotan Datuk Merah Unwashed per kwintal.					
kwaliteit I ukuran 4/8	—	HK\$. 82,—			
kwaliteit II ukuran 4/8	—	HK\$. 61,—			
kwaliteit III ukuran 4/8	—	HK\$. 45,—			
kwaliteit IV ukuran 4/8	—	HK\$. 17,—			
22. Rotan Datuk Putih W & S per kwintal.					
kwaliteit I ukuran 4/8	DM. 30,—	HK\$. 57,—			
kwaliteit II ukuran 4/8	DM. 23,—	HK\$. 42,—			
kwaliteit III ukuran 4/8	DM. 12,—	HK\$. 25,—			

	Tudjuan :	
	Eropa	Hongkong
23. Rotan Datuk Putih Unwashed per kwintal		
kwaliteit I ukuran 4/8	—	HK\$. 54,—
kwaliteit II ukuran 4/8	—	HK\$. 39,—
kwaliteit III ukuran 4/8	—	HK\$. 22,—
24. Rotan Kendari Buton Unwashed per kwintal.		
kwaliteit I ukuran 3/7	—	HK\$. 104,—
kwaliteit II ukuran 3/7	—	HK\$. 82,—
kwaliteit III ukuran 3/7	—	HK\$. 57,—
kwaliteit IV ukuran 3/7	—	HK\$. 28,—
25. Rotan Kendari Buton W & S per kwintal.		
kwaliteit I ukuran 3/7	DM. 65,—	HK\$. 107,—
kwaliteit II ukuran 3/7	DM. 50,—	HK\$. 85,—
kwaliteit III ukuran 3/7	DM. 32,—	HK\$. 59,—
kwaliteit IV ukuran 3/7	DM. 12,—	HK\$. 31,—
26. Rotan Manuk W & S per kwintal.		
kwaliteit I ukuran 10/12	DM. 5,—	HK\$. 12,—
27. Rotan Manuk Unwashed per kwintal	—	HK\$. 9,—
28. Rotan Sabutan W & S per kwintal.		
kwaliteit III ukuran 8/12	DM. 20,—	HK\$. 42,—
kwaliteit IIIB ukuran 8/12	DM. 19,—	HK\$. 41,—
kwaliteit IV ukuran 8/12	DM. 17,—	HK\$. 37,—
kwaliteit IV/B ukuran 8/12	DM. 12,—	HK\$. 29,—
kwaliteit V ukuran 8/12	DM. 10,—	HK\$. 25,—
29. Rotan Sabutan Unwashed per kwintal.		
kwaliteit III ukuran 8/12	—	HK\$. 39,—
kwaliteit III/B ukuran 8/12	—	HK\$. 38,—
kwaliteit IV ukuran 8/12	—	HK\$. 34,—
kwaliteit IV/B ukuran 8/12	—	HK\$. 27,—
kwaliteit V ukuran 8/12	—	HK\$. 22,—

(Sambungan dari hal. 38)

20. KATJANG TANAH KUPAS Per Kwintal.	
merah	DM. 55,—
putih	DM. 64,—
21. KATJANG TANAH BERKULIT Per Metric Ton	US\$. 90,—
22. INDIK DIPILIH DIPOTONG BASIS STANDARAARD 30/90 cm per metric ton	E.£. 210/9/6
23. BIDJI KAPOK Per Metric Ton.	
in bulk	E.£. 12/2/1
in bags	E.£. 14/5/3
24. AMPAS TAPIOCA Per Kwintal (Kadar Pati Max 73%).	
ampas tapioca	DM. 4.50
tepung ampas tapioca	DM. 5.40
25. GAPLEK Per Kwintal.	
gapplek gelondong	DM. 6,—
tepung gapplek	DM. 5.50
26. TEPUNG TAPIOCA Per Kwintal.	
kwaliteit AAA	E.£. 1/3/-
kwaliteit AA	E.£. 1/2/-
kwaliteit A	E.£. 1/1/-
27. PINANG Per Kwintal (Bukan Pinang Atjeh).	
sliced kwaliteit I	DM. 30,—
kwaliteit II	DM. 24,—
kwaliteit III	DM. 16,—
splitz kwaliteit I	DM. 24,—
kwaliteit II	DM. 17,—

	Tudjuan :	
	Eropa	Hongkong
30. Rotan Selutup (Serawak) W & S per kwintal.		
kwaliteit I ukuran 14 — up	DM. 55,—	HK\$. 92,—
kwaliteit II ukuran 14 — up	DM. 26,—	HK\$. 51,—
kwaliteit III ukuran 14 — up	DM. 17,—	HK\$. 28,—
31. Rotan Selutup (Serawak) Unwashed per kwintal.		
kwaliteit I ukuran 14 — up	—	HK\$. 89,—
kwaliteit II ukuran 14 — up	—	HK\$. 48,—
kwaliteit III ukuran 14 — up	—	HK\$. 25,—
32. Rotan Umbulu W & S per kwintal.		
kwaliteit I ukuran 10/24	DM. 25,—	HK\$. 42,—
kwaliteit II ukuran 10/24	DM. 15,—	HK\$. 28,—
kwaliteit II/B ukuran 10/24	DM. 12,—	HK\$. 24,—
kwaliteit III ukuran 10/24	—	HK\$. 15,—
33. Rotan Umbulu Unwashed per kwintal.		
kwaliteit I ukuran 10/24	—	HK\$. 39,—
kwaliteit II ukuran 10/24	—	HK\$. 25,—
kwaliteit II/B ukuran 10/24	—	HK\$. 21,—
kwaliteit III ukuran 10/24	—	HK\$. 12,—
34. Rotan Tarumpu W & S per kwintal.		
kwaliteit I ukuran 18/24	DM. 39,—	HK\$. 69,—
kwaliteit II ukuran 18/24	DM. 34,—	HK\$. 62,—
kwaliteit II/B ukuran 18/24	DM. 28,—	HK\$. 54,—
kwaliteit III ukuran 18/24	DM. 21,—	HK\$. 44,—
kwaliteit III/B ukuran 18/24	DM. 11,—	HK\$. 29,—
kwaliteit III ukuran 10/18	DM. 16,—	HK\$. 32,—
35. Rotan Tarumpu Unwashed per kwintal.		
kwaliteit I ukuran 18/24	—	HK\$. 61,—
kwaliteit II ukuran 18/24	—	HK\$. 59,—
kwaliteit II/B ukuran 18/24	—	HK\$. 51,—
kwaliteit III ukuran 18/24	—	HK\$. 41,—
kwaliteit III/B ukuran 18/24	—	HK\$. 27,—
kwaliteit III ukuran 10/24	—	HK\$. 29,—

Djakarta, 5 Djuni 1965

bulat putih	DM. 12,—
bulat merah	DM. 11,—
28. HEWAN HIDUP Per Ekor.	
sapi ex Bali	HK\$. 166,—
sapi ex Banda Atjeh	HK\$. 140,—
sapi ex Lombok	HK\$. 159,—
sapi ex Sumba	HK\$. 117,—
sapi ex Timor	HK\$. 105,—
sapi ex Djawa Timur/Surabaja	HK\$. 110,—
kerbau ex Bali	HK\$. 140,—
kerbau ex Banda Atjeh	HK\$. 120,—
kerbau ex Sumbawa Besar	HK\$. 152,—
kerbau ex Lombok, Bima, Sumba, Flores	HK\$. 142,—
kerbau ex Djawa Timur/Surabaja	HK\$. 107,—
babi	HK\$. 35,—
29. GAMBIR Per Kwintal.	
gambir kembang No. 1	E.£. 19/17/-
gambir bulat	E.£. 16/17/-
gambir persegi hitam (extrac)	E.£. 7/5/-
30. DJAGUNG Per Metric Ton.	
kuning/putih	US\$. 25,—
merah	US\$. 24,—

Djakarta, 5 Djuni 1965

PIMPINAN
BIRO LALU LINTAS DEWISA
DIREKTORIUM
ttd.
R. A. KARTADJOEMENA

Anda ingin SUKSES dalam Perdagangan ?

Datangilah

P.N. PEMBANGUNAN NIAGA



**Aparat Revolusi dalam
bidang perdagangan :**

IMPOR

EKSPOR

KONTRAKTOR

PROJEK dan INDUSTRI

Untuk suksesnja usaha anda, harap berhubungan dengan :

P.N. PEMBANGUNAN NIAGA

Division² :

- 1. IMPOR BAHAN BANGUNAN**
- 2. IMPOR ALAT² BESAR/MESIN²**
- 3. IMPOR MESIN² SANDANG**

Alamat :

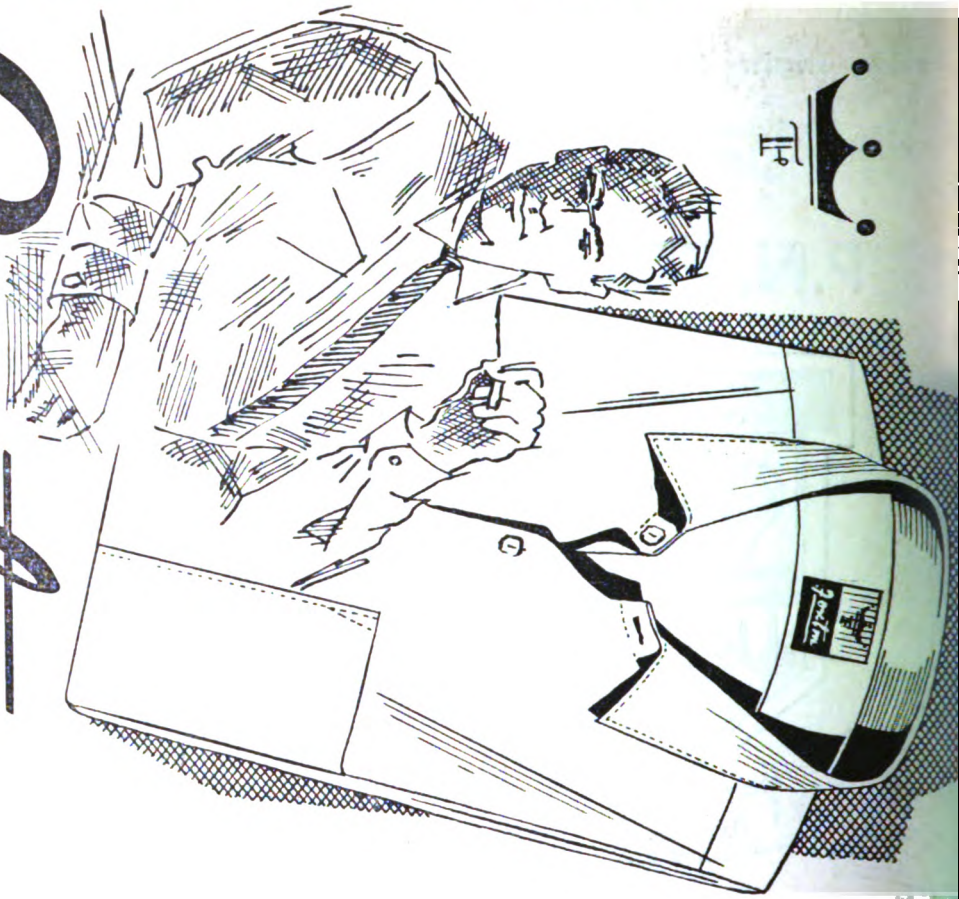
**Djl. Hajam Wuruk no. 127.
D J A K A R T A**

Division² :

- 1. IMPOR SANDANG PANGAN**
- 2. IMPOR BAHAN² CHEMICALIEN/PHARMASI**
- 3. E K S P O R**

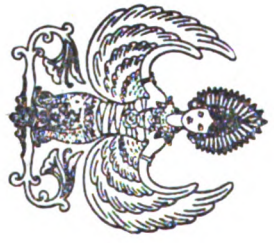
Alamat :

**Djl. Gadjah Mada no. 18.
D J A K A R T A**



Factor
SHIRT

P.N. PANTJA NIAGA



*Takwilah selamanya
Kenedia
meri "Factor"*

Unit Khusus KARJA TJOTAS Djakarta I

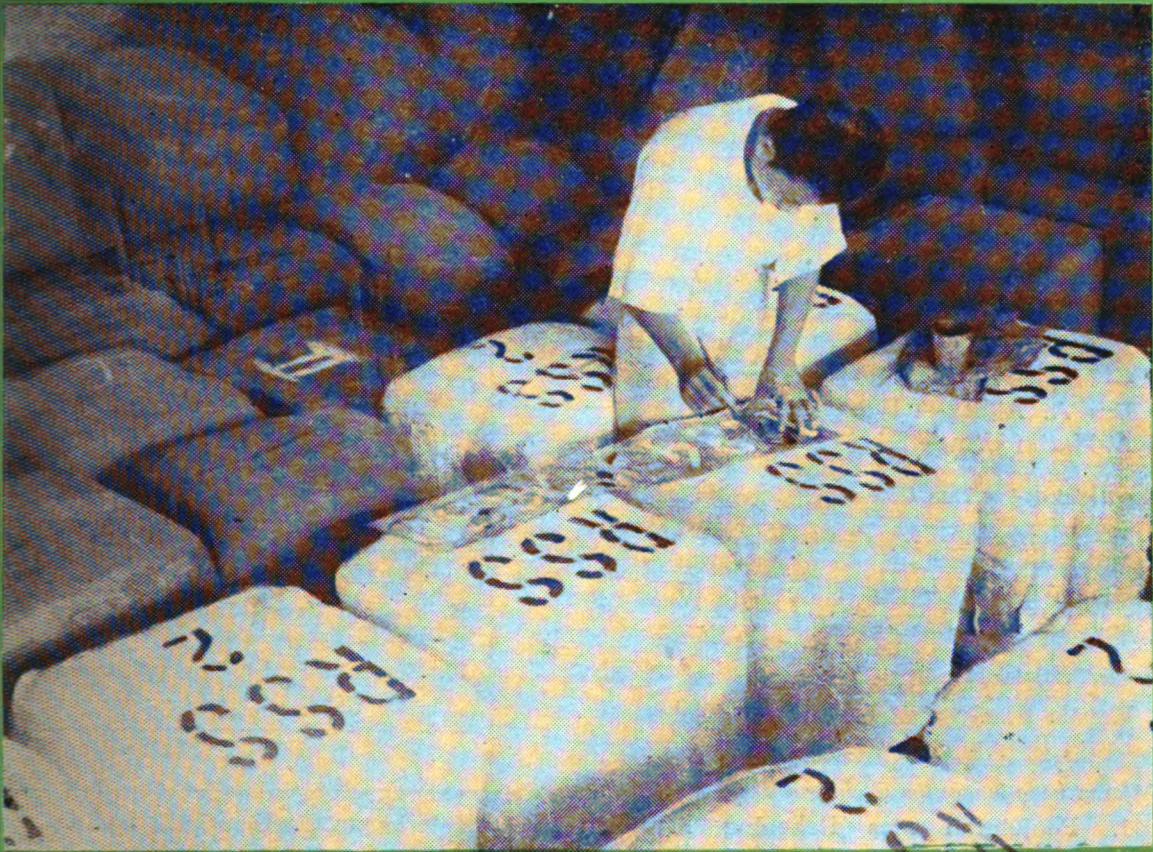
WARTA



Perdagangan

RECEIVED

AP NOV 11 1966
W299
P433
18
5
UNIV. WIS. LIBRARY



5

TAHUN KE-XVIII

22 JUNI 1965

MADJALAH
„WARTA PERDAGANGAN”

Terbit tiap 2 Minggu sekali

Diterbitkan oleh :

Departemen Perdagangan Dalam Negeri
beserta Urusan Perdagangan Luar Negeri
dari Kompartimen Luar Negeri/H.E.L.N.
dan Perdagangan Luar Negeri.

Pelindung :

J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/
Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri
BRIG. DJENDERAL A. JUSUF.

Pemimpin Umum :

Kepala Direktorat Marketing dan Research :
Ir. J. J. Pitoy M.A. econ.

Staf Redaksi :

Staf Direktorat Marketing dan Research.

Penanggung Jawab :

Kepala Seksi Publikasi Madjalah
Anwar B. Harahap.

Pembantu Tetap :

Prof. Ir. Teko Sumodwirjo
Kolonel Jusuf Ramli
Major A. Rachman Rukmantara
R. Hertatijanto S.H.
Drs. Waskito
Dr. J. Panglaykim

Pembantu^a Khusus :

Kolonel Usman Ismail — Alamsjah S.B.P. —
R.H. Tuwaidan M.A. — Drs Sjaaf Muchtar
— Major Drs Sukadjat — Zahar — R. Isa —
Drs A. Aidit — Suprpto — Sudjadi —
A. Karim Usman S.H. — Dudy Djaya.

Alamat Redaksi dan Tata Usaha :

Madjalah „WARTA PERDAGANGAN”
Direktorat Marketing dan Research
Djalan Tanah Abang Timur No. 87
D J A K A R T A

Pelaksana/Pertjetakan :

Kepala Pertjetakan P.N. Karya Tjotas
Burdi Reksodirdjo.

Pembayaran uang langganan dilakukan dimuka dengan :

1. Penjetoran atas Rekening Madjalah
„Warta Perdagangan” Kode No: KB/
W.A.-194, pada Bank Indonesia —
Dj: Thamrin, Djakarta.
2. Dinas Giro dan Tjek Pos atau dengan
pos wissel jang langsung dialamatkan
kepada Tata Usaha Warta Perdagangan
Direktorat Marketing dan Research.

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar Redaksi
2. Dimanakah Tindjumu (Adjaran Pemimpin
Besar Revolusi Bung Karno)
3. Pemberian Wewenang kepada Menko Luar
Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan
Perdagangan Luar Negeri dibidang perda-
gangan luar negeri.
4. Penertiban Perusahaan-Perusahaan Niaga
Negara di luar negeri.
5. a. Pembelian dari luar negeri jang meng-
gunakan Devisa Negara 1
b. Projek-projek Production Sharing 1
6. Tjara-tjara/prosedur impor di Indonesia
dewasa ini.
7. Organisasi dan susunan Direktorat Metrologi 1
8. a. Pembentukan Kompartimen Maritim ... 1
b. Indonesia akan kuat, sentausa serta adil
dan makmur djika Bangsa Indonesia
kembali mengarungi lautan.
c. Armada Niaga dunia 1
9. Pembentukan Kompartimen Agama dan
Reorganisasi Kompartimen Keuangan. 1
10. Sembojan BERDIKARI menggelegar gema-
nja di Asia dan Afrika.
11. Perdagangan Indonesia-Swiss 2
12. Units of Measurements 2
13. Pelaksanaan Banting Stir dibidang Ekonomi
(Instruksi Presiden kepada Menko
UPPENAS).
14. a. Perobahan susunan BAPERDEP Perda-
gangan.
b. Pembubaran Dewan Pertimbangan Men-
teri Perdagangan.
15. Persaingan antara Karet Alam dan Karet
Sintetis.
16. Ekspor dengan Counter import 30% (dari
Sumatera dan kepulauan sekitarnja ke
Sabang).
17. Asuransi (B.L.L.D.) 2
18. Organisasi dan Administrasi (Pengertian
dan Masalah).
19. Susunan Dewan Lalu Lintas Devisa (P.P.
No. 22 Tahun 1965).
20. Harga Penjerahan Barang² Ekspor
Golongan II (B.L.L.D.)

Keterangan Gambar kulit muka :

Karet RSS 2, siap untuk diekspor.

Foto: UDJANA PRESS.

Surat Izin terbit No.. 21A/SK/UPPG/SIT-1965
tanggal 17-4-1965.

Dengan tudjuaan agar dapat memberikan pelajanaan/service jang lebih baik lagi kepada jang terhormat para peminat/pembatja Madjalah saudara ini serta untuk mengatasi gangguan-gangguan tehnis jang mempengaruhi lantjarnja usaha-usaha penerbitan, dengan ini diberitahukan bahwa MULAI NOMOR ini, MADJALAH WARTA PERDAGANGAN DITERBITKAN 2 (DUA) MINGGU SEKALI. Dengan adanja pengertian dan kerdjasama dari segala pihak jang berkepentingan, kami jakin bahwa penjesuaian tehnis ini tidak akan mengurangi kemanfaatan dan tudjuaan dari penerbitan media resmi dari Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri ini.

Kita menjaksikan dalam dua pekan ini bahwa sesuai dengan peningkatan revolusi, serta dalam rangka melandjutkan usaha untuk menjempurnakan dan mempertinggi daja kerdja Kabinet Dwikora, dengan prinsip "BERDIKARP", maka dengan Keputusan Presiden R.I. No. 180 tahun 1965, telah ditetapkan Pembentukan Kompartimen Agama dan Penjusunan Kembali Kompartimen Keuangan, dan dengan Keputusan Presiden R.I. No. 156 tahun 1965 telah ditetapkan Pembentukan Kompartimen Maritim; belakangan ini dengan pertimbangan antara lain untuk mengembalikan Bangsa Indonesia mendjadi Bangsa Bahari jang benar-benar dapat menguasai Kedjajaan dan Kekajaan Maritim Indonesia.

Pengertian dan Masalah "Organisasi dan Administrasi" jang dimuat dalam nomor ini adalah landjutan dari masalah "Perentjanaan" dalam Warta Perdagangan No. 3, sedangkan dalam nomor-nomor jang akan datang berturut-turut akan disadjikan pengertian dan masalah "Pelaksanaan" dan "Pengawasan dan Penilaian".

Chususnja untuk keperluan para pengusaha impor, maka oleh Urusan Perdagangan Luar Negeri cq. Direktorat Impor telah disusun suatu pedoman mengenai tjara-tjara/prosedure impor jang berlaku per medio Djuni 1965, jang merupakan sekedar suatu inventarisasi setjara sistimatis mengenai peraturan-peraturan jang berlaku pada dewasa ini.

Kemungkinan perluasan perdagangan antara Indonesia dengan Swiss jang disertai dengan fakta, angka serta usul-usul konkrit kiranja perlu mendapat perhatian dari para pengusaha ekspor pada chususnja; hal-hal jang dilaporkan oleh KBRI. di Bern tersebut pada hakekatnja dan pada umumnja berlaku djuga terhadap usaha-usaha memperkembangkan perdagangan dengan negara-negara lainnja.

Persaingan antara karet alam dan karet sintetik jang dimuat dalam nomor ini sepatutnja mendapat perhatian penuh dari dunia perkaretan di Indonesia, di mana diuraikan kemungkinan-kemungkinan mengadakan spesifikasi tehnis jang diperlukan oleh konsumen jang akan merupakan djawaban terhadap tantangan karet sintetik.

Adjaran² Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno

II Dimanakah Tindjumu?



DIMANAKAH KEKUATAN JANG MENGHANTURKAN SEGALA HAL JANG MELAWAN?

Gelijik de grote oceaan doordrongen is van het zout, zo is mijn leer doordrenkt van de geest der bevrijding

Kulla Vagga

Dalam "Suluh Indonesia Muda" nomor tiga, maka Ir. J. ada membentangkan pendapat-pendapatnja tentang problim agraria, yakni soal bagaimana kita bisa menolong rakjat tanah Djawa dari kemelataran jang bertambah-tambah haibatnja itu, dan jang terdjadi oleh karena makin lama makin banjaklah djumlah rakjat jang memakan hasilnja tanah Djawa itu. Bertambah-tambahnja penduduk itu adalah terdjadi oleh karena djumlah orang meninggal dunia saban tahunnja ada lebih ketjil daripada djumlah orang jang dilahirkan; dan oleh sebab bertambahnja rakjat ini tidak diikuti oleh tambahnja hasilnja bumi jang sepadan, maka nistjajalah makin lama makin ketjil sahadja bagian masing-masing orang dalam pembagian rezeki tanah Djawa itu. Adapun banjaklah obat untuk mentjegah kerasnja penjakit ini: kita bisa menambah luasnja tanah jang dipakai untuk sawah atau tegalan; kita bisa memperbaiki tjara pertanian, sehingga hasil sebau-bahunja bisa bertambah; kita bisa mengadakan kepabrikan (industri), dimana banjak orang bisa bekerdja dan mendapat penghidupan; atau kita bisa memindahkan sebagian rakjat tanah Djawa itu kelain-lain pulau Indonesia, misalnja Sumatera. Akan tetapi sukarlah semua obat ini bisa tertjapai dalam sebentar tempo. Menambah sawah atau tegalan tahadi; mengadakan tjara pertanian jang lebih menghasilkan; mengadakan kepabrikan; memindahkan rakjat dengan beratus-ratus ribu kepulau lain, itu semuanya bukanlah hal-hal jang bisa terdjadi dalam sebentar tempo. Inilah sukarnja problim agraris tahadi!

Adapun Ir. J. telah menundjukkan pula obatnja: hendaklah katanja, kita menjokong modal-modal asing dilain-lain pulau Indonesia itu dengan menjumbangkan berketi-keti kaum buruh dari tanah Djawa, supaja mereka mendapat penghidupan; hendaklah, untuk hal ini aturan poenale sanctie itu dihapuskan dan diganti dengan aturan kerdja-merdeka! Penjokongan pada modal asing itu ada-

lah perlu, katanja, oleh karena, selainnja modal long kemelataran rakjat tanah Djawa itu, hal ini nistjaja pula menolong pulau-pulau tahadi: sebsuburnja modal asing itu nistjajalah mendatarkan kemakmuran, dan nistjajalah mendatarkan djalan² kereta-api, djalan-djalan pelajaran dan lain-lain. Dan djikalau kita tidak mufakat akan "obat" ini, djikalau kita tidak setudju akan penjokongan modal asing itu, maka Ir. J. menanjanja kita: "Dimanakah tindjumu? Dimanakah kekuatan jang menghanturkan segala hal jang melawan?"

Sebab katanja, "kekuasaan modal itu ada; dan modal itu bertambah-tambah sahadja memperkudiri dengan air-penghidupan dari dalam dan dari luar, walaupun kita mentjegahnja".

Begitulah pendiriannja Ir. J.

Sebelum kita menguraikan apa sebabnja kita tidak setudju dengan pendirian jang sematjam ini, maka berfaedahlah agaknja, djikalau kita telah dahulu menjelidiki soal „terlalu-banjaknja-rakjat" yakni soal overbevolking tahadi.

Adapun soal overbevolking itu, pada hakekatnya tidaklah tergantung dari berapa banjaknja penduduk, dan tidaklah tergantung dari berapa sesaknja negeri dimana penduduk itu berdiam. Soal overbevolking adalah soal rezeki; adalah soal jang mengadakan pertanjaan atas tjukuk atau tidaknja makanan dalam negeri tahadi. Sebab, tidakkah banjak negeri jang penuh sesak dengan penduduk, dimana, oleh banjaknja rezeki overbevolking itu tidak terasa? Tidakkah banjak pula negeri, jang sedikit sekali penduduknja, dimana rakjatnja, karena kurangnja makanan, sa-pindah kenegeri lain? Kita mengetahui, bahwa umpamanya dalam tahun 1910, dinegeri Djerman jang mempunyai penduduk 120 orang dalam tiap kilometer persegi, hanja 25.531 oranglah jang meninggalkan negeri itu untuk mentjari penghidupan dinegeri lain; dan kita mengetahui; bahwa dalam tahun 1910 itu djuga, dinegeri Oostenrijk Hongaria, jang penduduknja hanja 76 orang se-kilometer persegi, djumlah rakjat jang pindah ke lain negeri adalah sampai 278.240,— yakni ham-pisabelas kali djumlahnja orang jang keluar dari negeri Djerman tahadi itu!

Bahwasanja: soal „overbevolkt” atau tidaknja tanah Djawa itu, hanjalah tergantung dari tjukup atau tidaknja rezeki tanah Djawa itu pula; hanjalah ia tergantung dari banjak-sedikitnja makanan; dan tidaklah ia tergantung dari djumlah penduduk sekilometer-kilometer perseginja!

Betul djumlah rakjat tanah Djawa itu makin lama makin tambah; betul tambahnja itu begitu cepat, sehingga Dr. Bleeker dalam tahun 1863 berani mengatakan, bahwa djumlah rakjat tanah Djawa itu dalam tiap-tiap 35 tahun akan mendjadi empat dua kali ganda besarnja; betul dalam tiga puluh lima tahun antara 1865 dan 1900 teori Dr. Bleeker itu ada tjotjok dengan keadaan jang se-sempit; betul untuk tahun-tahun jang belakangan ini, maka tempo mendjadinja dua kali ganda itu oleh Kerk-kamp masih ditetapkan atas 42 tahun; - pendek kata: betul tanah Djawa itu rakjatnja tjepat sekali bertambahnja; (walaupun teori² Bleeker dan Kerkkamp itu dua²nja tidak tjotjok buat se-lama²nja); dan betul tanah Djawa itu kalau dibandingkan dengan negeri² lain sudah sesak sekali, - akan tetapi, apakah kiranya ditanah Djawa itu ada penjakit „overbevolking”, djikalau tjepat-naiknja djumlah rakjat itu diikuti oleh djumlah naiknja rezeki jang sepadan? Dan apakah si-Djawa itu sampai menderita kelaparan, bilamana persediaan makanan baginja sudah tjukup?

Memang, memang! Baik sekalilah adanja, kalau sebagian rakjat Djawa itu bisa pindah ke Sumatera; baik sekali kalau pindahan rakjat itu bisa sukses terdjadi. Akan tetapi apakah jang harus kita perbuat, kalau pemindahan rakjat itu tidak bisa terdjadi dengan sungguh-sungguhnya sebagai sekarang ini; apakah jang harus kita ihtiarakan terhadap pada emigrasi ini, djikalau emigrasi itu sampai sekarang hanya ketjil-ketjilan sahadj, dan tidak beratus-ratus ribu sebagai jang diinginkan oleh Ir. J. itu?

Poenale Sanctie! Baik, kitapun mengharap dan berdoa, moga-moga poenale sanctie itu lekas musnah dari dunia ini; kitapun mengerti bahwa aturan-terdjadi sebagai budak-belian itu mengurangkan nafarakjat tanah Djawa buat menjerahkan diri dalam penganggannja „werek”; kitapun mengerti, bahwa nafsu mentjari kerdja dilain pulau itu nistjaja mendjadi lebih besar, djikalau poenale sanctie itu dihapuskan; akan tetapi kita tidak pertjaja, bahwa lenjapnja poenale sanctie itu sahadj akan bisa memindahkan beratus-ratus ribu kaum buruh dari tanah Djawa ke tiap-tiap tahun walaupun disokong oleh siapa saja, kita tidak pertjaja, bahwa hapusnja poenale sanctie itu sahadj bisa mendjadi obat jang mustadjab bagi penjakit „overbevolking” tanah Djawa. Sebab emigrasi itu tidaklah tergantung dari ada atau tidak adanja salah suatu aturan. Emigrasi adalah suatu soal rezeki!

Karenanja, tidak pertama-tama berhubung dengan harapan akan emigrasi inilah, maka kita harus akan lenjapnja poenale sanctie itu. Kita

menuntut ditjabatnja, ialah dengan alasan-alasan rasa-kemanusiaan; kita menuntut hilangnya, ialah oleh karena aturan itu ada aturan jang hina!

Marilah kita melandjutkan penjelidikan kita tentang soal overbevolking ditanah Djawa itu. Djikalau kita ingin mengerti betul-betul akan soal itu, djikalau kita ingin mengerti dengan terang-benderang akan naik-turunnja djumlah penduduk tanah Djawa itu, maka haruslah kita mengetahui pula djalannja politik atau susunan ekonomi sediakala; haruslah kita mengenali betul-betul segala keadaan jang berpengaruh atas soal tahadi itu.

Sebab keadaan djumlah penduduk dalam sesuatu negeri, adalah berhubungan rapat dengan aturan politik dan susunan ekonomi dinegeri itu pula.

Perhatikanlah angka-angka dibawah ini:

Penduduk tanah Djawa tiap-kilometer perseginja, ialah:

dalam tahun	1810	29	djiwa
„	„	1830	54
„	„	1850	72
„	„	1860	96
„	„	1870	124
„	„	1880	150
„	„	1890	181
„	„	1900	218
„	„	1905	226

Djadi tambahnja penduduk tanah Djawa itu adalah sebagai berikut:

1810 sampai	1830	86 %	atau	4.3 %	tiap-tahunnja
1830	„	1850	33 %	atau	1.65%
1850	„	1860	33 %	atau	3.3 %
1860	„	1870	29 %	atau	2.9 %
1870	„	1880	21 %	atau	2.1 %
1880	„	1890	20.6%	atau	2.06%
1890	„	1900	20.5%	atau	2.05%
1900	„	1905	5 %	atau	1 %

Bukankah dengan angka-angka diatas ini tampak dengan seterang-terangnja perhubungan antara tambahnja penduduk tiap-tahunnja dengan aturan politik atau susunan ekonomi? Sebab, bukankah tjepat naiknja djumlah penduduk diantara 1810 dan 1830 itu ialah terdjadi oleh perobahan-perobahan jang diadakan oleh Raffles, jang politiknja ada „vrijzinnig” (bebas), djikalau dibandingkan dengan politiknja orang Belanda pada masa itu, dan jang „membikin tempo pemerintahannja jang pendek itu sebagai salah satu dari jang paling penting dalam seluruh riwayat tanah Djawa”? Bukankah turunnja persentase antara 1830 dan 1850 itu ialah terdjadi oleh kerasnja tindasan culturstelsel, jang mulai 1830 diderita oleh rakjat tanah Djawa? Bukankah naiknja lagi persentase sesudah itu antara 1850 dan 1860 ialah terdjadi dari bangkrutnja politik culturstelsel dan mulainja perlawanan politik liberal terhadap politik jang „kuno”, sedang mulai masa itu pula sebagian rakjat tanah Djawa bisa sedikit² mentjari penghidupan dalam onderneming-onderneming dan lain-lain perusahaan? Dan bukankah turunnja lagi

persentase sesudahnja tahun 1860 itu ialah terdjadi masuknja tanah Djawa dalam masa modern kapitalistis?

Sesudahnja tahun 1860, teristimewa sesudahnja tahun 1870, maka menangleh sama sekali politiknja kaum burdjuasiliberal dalam pertandingan terhadap pada politiknja kaum kuno itu; dan sebagai angin penjakit jang makin lama makin djahat, masuklah modal asing ditanah Djawa. Tindasanja cultuurstelsel adalah diganti dengan gentjetan modal asing; perasannja politik „batig slot” diganti dengan isapannja politik „zoet dividen”; itulah sebabnja, maka semendjak 1870 persentase tambahnja rakjat itu makin lama selalu makin ketjil sahadja adanja!

Tetapi, walaupun tindasan dan perasan dan isapan jang sangat itu, walaupun selalu mundurnja persentase tahadi, maka kekuatan hidup atau vitaliteitnja rakjat tanah Djawa adalah tak terhingga besarnya. Walaupun kesengsaraan jang dideritanja, walaupun „via dolorosa” jang didjalaninja, maka masihlah besar sekali djumlah penduduk tanah Djawa ditiap-tiap kilometer persegi djikalau dibandingkan dengan rakjat tani dinegeri-negeri asing: Hanja sedikitlah negeri-negeri dimuka bumi ini, jang mempunjai penduduk lebih dari 260 djiwa sekilometer perseginja sebagai tanah Djawa itu!

Bukti atas perhubungan antara tambahnja penduduk (bevolkingsaanwas) dengan aturan politik atau susunan ekonomi diatas ini, adalah perlu sekali, oleh karena setengah orang mengira, bahwa, - oleh sebab menurut pendapatnja overbevolking itu terdjadinja hanja karena tambahnja penduduk jang terlampau tjepat itu sahadja -, penjakit itu bisa kita obati dengan mentjegah bevolkingsaanwas itu pula. Mereka mengira, bahwa bahaya overbevolking ini bisa ditjegahnja dengan memberi pendidikan pada rakjat supaja mengurangi nafsunja mengadakan turunan.

Mereka tak mengerti, bahwa „obat” ini mustahil bisa terdjadi. Tak mengerti bahwa pendidikan mentjegah turunan ini akan hantjur dan binasa berbentusan dengan tabiatnja manusia; tak mengerti, bahwa djalan jang satu²nja untuk mentjegah tambahnja penduduk itu ialah penindasan dan perasan sahadja, jang lebih sangat dan lebih keras daripada tindasan dan perasan cultuurstelsel umpamanja!

Kembali lagi pada penjelidikan kita: Diatas kita sudah menulis bahwa, kalau bisa, kita setudju akan emigrasi jang se-tjepat²nja kelain pulau Indonesia. Tetapi kita tak pertjaja, bahwa hapusnja poenale sanctie itu sahadja bisa menarik berratus-ratus ribu manusia dari tanah Djawa, walaupun „akal” atau „sokongan” jang bagaimana djuga. Kita tidak pertjaja atasnja, oleh karena, sebagai jang sudah kita terangkan diatas, emigrasi itu ialah suatu kedjadian jang tergantung dari rezeki.

Artinja: Selama sesuatu rakjat dalam negerinja sendiri masih ada „djalan” dalam pentjahariannja

rezeki, selama rakjat itu masih bisa mentjari „akal” dinegerinja sendiri dalam urusan penghidupannja, - selama itu, maka, walaupun „djalan” atau „akal” itu kiranja ada sukar dan susah, tidaklah rakjat itu meninggalkan negerinja untuk mentjari penghidupan dinegeri djauh. Selama rakjat tanah Djawa masih ada „djalan” dan „akal” itu -, selama itu maka, walaupun keadaan ekonominja sudah sengsara atau lehernja hampir tertjekek sebagai keadaan sekarang ini, djumlahnja emigran tentulah ketjil sahadja. Selama itu, maka, walaupun kita berusaha keras untuk emigrasi itu, pastilah tetap ketjil sahadja hasil segala usaha kita itu. Sebab begitulah memang tabiatnja rakjat!

Riwayat emigrasi mengadjarkan pada kita, bahwa emigrasi itu hanjalah bisa terdjadi dengan sungguh-sungguh, djikalau segala sumber penghidupan dinegeri sendiri memang sudah tertutup sama sekali adanja. Akan tetapi, bilamana emigrasi itu sudah terdjadi; bilamana pada sesuatu masa berratus-ratus ribu atau berdjuta-djuta rakjat sudah sama meninggalkan negerinja untuk mentjari penghidupan dinegeri lain, maka riwayat dunia menunjukkan, bahwa aliran rakjat pindah itu pada suatu ketika berhenti pula.

Sebab dalam pada itu, negeri sendiri lalu berobah pula. Dalam pada itu, negeri sendiri lalu mengadakan perobahan dalam tjaranja mentjari rezeki: mengadakan perbaikan tjara pertanian; perbaikan pertukangan (nijverheid); dan mulailah dalam negeri sendiri itu timbul suatu kepabrikan (industri), jang memberi kerdja dan penghidupan pada bagian rakjat jang masih „lebih”, sehingga „kelebihan” rakjat ini seolah-olah diisap lagi oleh pergaulan hidup dinegeri sendiri tahadi adanja.

Kita mengambil peladjaran dari riwayat dunia bahwa semua emigrasi itu terdjadinja ialah dalam masa, jang mendahului suburnja tjara pentjahanian rezeki atau suburnja kepabrikan dalam negeri dari rakjat jang beremigrasi itu. Kita melihat emigrasi itu pada rakjat Inggris pada masa sebelum 1860, dimana industri Inggris mulai mendjadi besar. Kita melihat pindahan - rakjat Djerman dan Perantjis. Pada waktu sebelum 1880, dimana kepabrikan Djerman dan Perantjis mulai subur. Dan kita melihat bahwa timbulnja kepabrikan dinegeri Djepang itu ialah didahului oleh emigrasi djus adanja. Dan tidakkah transmigrasi dari Daerah Kedu itu makin lama makin kurang, sesudah rakjat Kedu dengan usaha sendiri mengadakan tjara pertanian jang lebih menghasilkan; tidakkah, semendjak perbaikan tjara pertanian ini diadakan, transmigrasi dari Kedu itu makin lama makin berkurang walaupun Kedu itu sesaknja penduduk dalam 1900 sudah sampai 497 djiwa rata² sekilometer perseginja?

Peladjaran jang kita ambil dari fatsal diatas ialah bahwa emigrasi itu tidak bisa terdjadi sesungguhnya djikalau memang belum tenpon. Kita melihat, bahwa dinegeri Inggris, dinegeri Djerman, dinegeri Perantjis, dinegeri Djepang

emigrasi itu ialah pendahuluanja masa kepabrikaan, dan menjadi penolong masa kekurangan makanan yang ada dimuka masa kepabrikaan itu. Tegassaja: emigrasi itu ialah terikat oleh tempo; emigrasi tidak bisa kita adakan dalam se-waktu² sahadja kalau memang belum musimnja, walaupun kita menjokong bagaimana djuga. Emigrasi itu akan terdjadi sendiri kalau memang temponja sudah datang.....

Dalam pada itu, maka tidaklah kita mengatakan, bahwa kita tak boleh dan tak harus meratakan djalan untuk emigrasi itu. Sebaliknya: Kita harus bersedia dan kita harus mengaturnja, agar supaya emigrasi itu bisa terdjadi dengan gampang dan lekas, nanti kalau temponja sudah datang. Dan tempo itu pastilah datang, oleh karena pergaulan hidup bersama ialah suatu hal yang hidup pula, dan yang senantiasa menudju tingkat yang lebih tinggi; tegassaja: tempo itu pastilah datang, oleh karena susunan hidup-bersama ditanah Djawa ini, menurut hukum evolusi, pasti pula meninggalkan tingkat yang sekarang ini, dan pastilah naik ketingkat yang kemudian, yakni: pasti meninggalkan tingkat pertanian yang sekarang ini dan pasti menaik ketingkat kepabrikaan. Dan sebelum tingkat kepabrikaan itu tertjapai, maka lebih dulu terasap penyakit overbevolking itu dengan sekeras-kerasnja; sebelum tingkat yang sekarang ini ditinggalkan, sebelum tingkat kepabrikaan itu tertjapai, maka haruslah pergaulan hidup tanah Djawa itu melalui tingkat-perubahan, - overgangssphase -, lebih dahulu. Dan tingkat - perubahan ini ialah masa menghaibatnja overbevolking tahadi; overgangssphase ini ialah masa dimana sebagian rakjat tanah Djawa, dari kerasnja overbevolking tahadi, sama pindah kelain pulau untuk mentjari pekerjaan dan untuk mentjari penghidupan.

Akan tetapi, djikalau dalam pada masa emigrasi itu tjara pentjaharian rezeki ditanah Djawa sudah memperbaiki diri sendiri; djikalau kebutuhan akan tjara pentjaharian rezeki yang lebih baik itu sudah mendatangkan perbaikan dalam tjara pertanian; djikalau tanah Djawa sudah mulai mengindjak tingkat kepabrikaan; - maka berhentilah pula emigrasi itu, dan berhentilah pula keharusan akan mentjari rezeki dinegeri lain. Sebab, sebagai yang sudah kita terangkan dimuka, pergaulan hidup sendiri lantas „mengisap” bagian rakjat yang lebih” itu!

Sekali lagi kita mengulangi: Emigrasi ialah suatu „maatschappelijk-verschijnsel”, yang mulainja atau berhentinja ditetapkan oleh masyarakat sendiri itu djuga. Karenanja, maka kita tak pertjaja djikalau memang belum temponja, yakni djikalau pergaulan hidup di tanah Djawa belum memasak sendiri akan emigrasi itu dengan kekuatannja keharusan yang tak terhingga adanja!

Akan tetapi, bolehkah kita berdiam-diam sahadja membiarkan kemelaratan yang sekarang ini, sambil emigrasi itu terdjadi sendiri; bolehkah kita tidak berusaha meringankan penghidupan rakjat

itu, dan tidak melalui segala djalan yang waljit kita lalui?

Tidak, tidak, dan sekali lagi: tidak!

Kita harus memerangi segala keadaan yang melambah kemelaratan rakjat itu; memerangi segala hal-hal yang memberatkan penghidupannja rakjat, yang karena terlalu besarnja bevolkingsaanwas (tambahnja penduduk), memang sudah berat adanja; memerangi segala hal-hal yang mengetjilkan persediaan rezeki rakjat tahadi.

Sebab, asal rezeki tjukup, asal makanan tak kurang, maka sebagai yang kita terangkan dimuka, tak akanlah rakjat menderita tak ketjukupan dan kekurangan, tak akanlah overbevolking terasa, walaupun bevolkingsaanwas yang bagaimana djuga. Karenanja, haruslah kita melawan segala keadaan yang mengetjilkan persediaan makanan rakjat itu. Dan teristimewa, haruslah kita memerangi industri gula adanja.

Sebab kita mengetahui, bahwa industri ini, walaupun pembela-pembelanja mengatakan, bahwa „industri ini memberi begitu banjak uang pada sebagian penduduk Djawa”, dengan „memberi begitu banjak uang” pada orang² itu, - hal ini belum tentu berapa „banjaknja” -, walaupun oleh Schmalhausen dihitung berdjumlah empat puluh djuta rupiah setahunnja, ada menimbulkan suatu golongan rakjat dalam pergaulan hidup tanah Djawa yang terpadamkan kebutuhannja akan menaikkan pergaulan hidup itu keatas tingkat yang lebih tinggi, sedang kebutuhan inilah yang harus ada untuk kenaikan itu. Kita mengentahui bahwa industri ini merusak morilnja sebagian penduduk tanah Djawa; mengetahui, bahwa aturan menanam tebu sekali dalam tiga tahun diatas satu tempat itu adalah suatu aturan yang memberi keuntungan pada industri itu dengan pertjuma; mengetahui, bahwa industri tak senang akan madjunja negeri dan rakjat, oleh sebab kemadjuan ini tentu menaikkan upah-upah dan sewa-sewa, lantaran kemadjuan itu menambah besarnja kebutuhan rakjat. Dan tidakkah banjak pula keberatan-keberatan atas industri ini? Tidakkah ia dengan aturan-aturan premi telah mengotorkan perhubungan kepala-kepala desa dengan rakjat?

Tidakkah ia mengetjilkan „gemiddeld grondbezit” (milik tanah rata-rata) sikaum tani? Tidakkah penjewakan tanah itu membikin banjak orang tani djadi kaum buruh? Tidakkah hati kita panas kalau kita memikirkan aturan „dag-en nachregeling” (aturan siang dan malam), yakni aturan menurut yang mana tanaman tebu mendapat air waktu siang dan tanaman padi waktu malam? Tidakkah tanah yang dulunja ditanami tebu itu menjadi kurang baik bagi tanaman padi? Tidakkah industri ini mengisap berdjuta-djuta rupiah dari pergaulan hidup tanah Djawa? Pendek kata: Tidakkah industri ini djauh dari mengajakan, bahkan memelaratkan tanah Djawa?

Berhubung dengan kedjahatan industri ini; berhubung dengan pengurangan rezeki tanah Djawa

itu, maka kita menuntut hapusnja industri itu sebagai adanya sekarang ini. Dan djikalau ada jang mengatakan, bahwa penghapusan industri ini akan menerdjunkan rakjat dalam dunia kemelaratan jang lebih haibat dari sekarang, djikalau masih ada bangsa kita jang menjesalinja, maka kita memperingatkan, bahwa hapusnja pabrik-pabrik gula di K a b a t dan R o g o d j a m p i di afdeling Banjuwangi umpamanja sama sekali tidak merugikan rakjat, tetapi menguntungkanlah adanya.

Dan dari djauh kita telah mendengar Ir. J. bertanja: "Dimanakah tindjumu? Dimanakah kekuatan jang menghantjurkan segala hal jang melawan?"

Memang, memang! Tiadalah suatu kekuatan jang bisa mendesak industri gula ini dan jang bisa menghantjurkan kedjahatannja, melainkan kekuatan pergerakan rakjat, jang sebagai palu godam haibatnja mendjatuhkan hantaman penuntutannja, dan jang sebagai bandjir melenjapkan segala hal jang menghalang-halanginja, djikalau tuntutan itu tidak dikabulkan.

Tiadalah suatu kekuatan jang bisa mendesaknja, melainkan suatu massa-aksi jang besar dan haibatnja ada berlipat-lipat ganda dari massa aksinja. Salikat Isiam meminta pengurangannja "suikerrietareaal" (luas tanah untuk tanaman tebu) pada masa kekurangan-makan beberapa tahun jang lalu, dan jang, sajang seribu sajang, lalu menjadi lembek sesudah ada pemeriksaan "kumisi-kumisian", jang hasilnja kekalnja keadaan jang dulu djuga!

Hendaklah kita mengambil pelajaran dari siasisanja pergerakan pengurangan suiker-areaal ini: Djanganlah kita menolentkan mata dalam usaha kita daripada maksud jang pertamata! Hendaklah kita insjaf, bahwa hanja perdjongan dalam pergerakan rakjat itu sahadjalah jang bisa mengundurkan musuh-musuh kita, dan tidak dalam usaha dewan-dewan, dimana menurut Ir. J. "dengan berhadap-hadapan muka dengan musuh, kita punja tjara perlawanan akan mendalam dan akan mendjadi bersih".

Sebab sebagaimana kita tak akan bisa mentjapai kemerdekaan tanah kita dengan djalan dewan-dewan itu, maka kapitalisme-gula tidaklah akan bisa hapus atau lenjap pula dengan kerdja dewan-dewan itu, melainkan dengan kekuasaan pergerakan rakjat jang sekuasa-kuasanja dan sehaibat-haibatnja!

Memang, benar sekali, benar sekali, djikalau Ir. J. menanja, dimana kita punja tindju itu sekarang! Tetapi sebaliknya, kita pun menanja padanja: Dimana tindju tuan, djikalau modal² asing di Sumatera itu mendjadi kuat dan kuasa lantaran sokongan tuan dengan kaum buruh tanah Djawa jang "beratus-ratus ribu" itu? Dimanakah tindju, dan dimanakah "machtsvorming en de invloed van ons Volk om af te weren die verderfelijke vernielzucht"?

Tuan pertjaja akan machtsvorming tahadi! Wahai, kita pun ada penuh kepertjajaan akan masa

jang akan datang. Kita pun ada penuh kepertjajaan, bahwa suatu kali rakjat kita pasti mentjapai machtsvorming itu pula, dan pasti "masih penuh kekuatan untuk mendjundjung diri menudju Sinar jang Satu jang berada ditengah-tengah kegelapgelitaan jang mengelilingi kita ini".

Kita mengulangi; dan kita menambah.

Kita mufakat akan emigrasi; kita ingin pula melihat pemindahan-rakjat kelain pulau Indonesia. Akan tetapi kita mengira, bahwa emigrasi itu tidak bisa terdjadi dengan sungguh-sungguh, djikalau susunan pergaulan hidup ditanah Djawa belum "masak" baginja. Kita teristimewa menuntut hapusnja industri gula sebagai adanya sekarang ini, dan jang mengurangi rezeki tanah Djawa itu, untuk meringankan penghidupan penduduk tanah Djawa sebelum pergaulannja hidup sendiri sebagai "veiligheidsklep" membangun emigrasi itu.

Kita yakin, bahwa obat jang semandjur-mandjurnja bagi penjakit overbevolking ini ialah tiada lain, melainkan perbaikan-perbaikan tjara pertanian dan perbaikan tjara pertukangan, dan berdirinja suatu industri Indonesia dengan modal Indonesia jang sekokoh-kokohnja, jang nanti akan "mengisap" segenap rakjat jang "lebih" sebagai jang telah terdjadi di Inggeris, dinegeri Djerman, dinegeri Perantjis, atau dinegeri Djepang itu, misalnja industri kain untuk mengganti keadaan jang sekarang, dimana hampir segenap rakjat Indonesia jang berpuluh-puluh djuta itu hampir semuanya sama memakai pakaian jang kainnja dari Eropah, seharga berpuluh-puluh djuta rupiah: sedang kapasnja hendaklah ditanam umpamanja ditanah tanah Sumatera jang kini masih kosong itu, sehingga penanaman kapas ini bisa memakai beribu-ribu kaum "lebih" dari tanah Djawa pula adanya.

Kita mengetahui, bahwa kepabrikan itu bisa pula mengandung ratjun dan bahaja bagi rakjat dan kaum buruh sebagai jang sudah terdjadi dimana-mana; tetapi kita mengetahui, bahwa adanya ratjun dan bahaja ini tidaklah tergantung dari adanya kepabrikan, melainkan dari tjaranja kepabrikan itu. Dan walaupun kepabrikan Indonesia ini pada waktu sekarang terdengarnja masih sebagai suatu impian; walaupun banjak orang jang menjangkal akan bisa terdjadinja kepabrikan itu, maka kita pertjaja, bahwa, menurut hukum alam, kepabrikan itu pastilah datang.

Kepertjajaan, kepertjajaanlah jang senantiasa mendjadi wahjunja kita punja fikiran dan perbuatan. Dan dengan kepertjajaan ini; dengan kepertjajaan bahwa segala obat-obat overbevolking itu pada waktunja tentu sama datang sendiri; dengan kepertjajaan, bahwa suatu masa kita tentu bisa pula mengenjahkan segala pengaruh-pengaruh jang menambah adanya bahaja overbevolking itu, maka dengan ketetapan hati kita mengarahkan muka kepada tempo jang akan datang, dan dengan ketetapan hati kita menjambut hari kemudian itu.

"Suluh Indonesia Muda", 1927

PEMBERIAN WEWENANG KEPADA MENKO KOMPARTIMEN LUAR NEGERI/HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI
DIBIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI.

PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang :

bahwa, untuk melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 tahun 1965 tentang pegintegrasian Perdagangan Luar Negeri, perlu diadakan ketentuan-ketentuan untuk mengintegrasikan kebidjaksanaan politik Perdagangan Luar Negeri serta pelaksanaannya dengan politik Luar Negeri ;

Mengingat :

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 tertanggal 10 Pebruari 1965 ;
Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II tahun 1960 ;
Deklarasi Ekonomi tanggal 28 Maret 1963 ;

Mendengar :

Presidium Kabinet.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Wewenang Kepada Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri Dibidang Urusan Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 1.

Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri diberi kekuasaan penuh untuk menetapkan kebidjaksanaan Pemerintah dibidang Impor dan Ekspor chususnja, urusan Perdagangan Luar Negeri umumnja serta mengatur pelaksanaannya.

Pasal 2.

Dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut pada Pasal 1. Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri dibantu oleh sebuah Board Urusan Perdagangan Luar Negeri, yang terdiri atas pedjabat-pedjabat :

- a. Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri, atau wakilnja.
- b. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, atau wakilnja
- c. Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan, atau wakilnja
- d. Menteri Perindustrian Rakjat, atau wakilnja
- e. Menteri Urusan Bank Sentral, atau wakilnja
- f. Menteri Perhubungan Laut, atau wakilnja
- g. Menteri Perkebunan, atau wakilnja
- h. Menteri Kehutanan atau wakilnja
- i. Menteri Pertanian, atau wakilnja
- j. Menteri Koperasi dan Transmigrasi, atau wakilnja
- k. Menteri Penerimaan, Pembiajaan dan Pengawasan, atau wakilnja
- l. Menteri Djaksa Agung, atau wakilnja
- m. Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri Urusan Funds dan Forces, atau wakilnja
- n. Biro Lalu Lintas Devisa, atau wakilnja
- o. Badan Pimpinan Umum Niaga, atau wakilnja
- p. Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia Sementara, atau wakilnja.

(2) Djumlah anggauta dari Board Panitia Penasehat Urusan Perdagangan Luar Negeri tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat ditambah oleh Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri djika dianggap perlu.

Pasal 3.

Board Urusan Perdagangan Luar Negeri melaksanakan tugas² yang diberikan oleh Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi

Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri dan memikirkan/mengusulkan bahan², diminta ataupun tidak, untuk menentukan kebidjaksanaan Pemerintah dibidang Perdagangan Luar Negeri pada umumnya, politik harga, pemasaran, pembelian dari ekspor dan impor pada khususnya, dengan tujuan untuk mendjamin kelantjaran perbekalan barang, mengembangkan dan mengintegrasikan pelaksanaan ekspor demi kesatuan operasi keluar Negeri.

Pasal 4.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 5.

Segala surat² Keputusan, penetapan², peraturan² dan sebagainya yang bertentangan dengan Surat Keputusan Presiden ini dengan ini dinyatakan tidak berlaku pada hari diundangkan.

Pasal 6.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : D j a k a r t a.
pada tanggal : 17 Mei 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 17 Mei 1965.

SEKRETARIS NEGARA,

ttd.

MOCH. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 No. 39.

**PENDJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 23
TAHUN 1965.**

**TENTANG
PEMBERIAN WEWENANG KEPADA MENKO
KOMPARTIMEN LUAR NEGERI/HUBUNGAN
EKONOMI LUAR NEGERI DAN PERDAGA-
NGAN LUAR NEGERI DIBIDANG PERDA-
GANGAN LUAR NEGERI**

Sesuai dan seirama dengan perkembangan politik negara dan taraf perjuangannya bangsa Indonesia dalam penyelesaian revolusi, kebidjaksanaan pokok dibidang ekonomi harus disatukan dengan kebidjaksanaan Umum Revolusi Indonesia

Disamping itu guna pembiayaan pelaksanaan pembangunan nasional semesta berentjana sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara No. II, MPRS/1960 membutuhkan sedjumlah besar devisa yang diperoleh terutama dari hasil pendjuaraan barang ekspor kita diluar negeri.

Berhubung dengan itu perdagangan ekspor adalah merupakan tulang punggung dan pegangan peranan penting dalam melantjarkan pembangunan.

Untuk itu dirasakan benar kebutuhannya akan perlunya kesatuan tindakan, pengintegrasian dan urusan perdagangan luar negeri impor ekspor khususnya serta pelaksanaannya didalam satu wewenang.

Lembaga Negara yang dipandang setepat-tepatnya untuk maksud diatas ialah Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri yang dalam melaksanakan wewenangnja dibantu oleh satu Board yang terdiri dari wakil² instansi Pemerintah dan Swasta yang berketjimpung dan berkepentingan dibidang urusan Perdagangan Luar Negeri baik sebagai tugas sehari-hari maupun sebagai usaha. Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri bersama Board termaksud diatas dalam waktu singkat dikembangkan dapat memperkembangkan urusan perdagangan luar negeri kita.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 274

Masih tersedia dalam djumlah yang sangat terbatas Buku yang sangat diperlukan oleh business-man yakni : **TRADE DIRECTORY of Indonesia 1964/1965.** Pesanan² dapat segera diadjukan, kepada Tata Usaha Direktorat Marketing dan Research, Tanah Abang Timur 87. Djakarta.

Tebal buku 752 halaman, kertas kuntsdruk.

Harga per buku Rp. 15.000.—

PENERTIBAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NIAGA NEGARA DI LUAR NEGERI

Untuk merealisasikan Amanat Politik P.J.M. Presiden Sukarno didepan sidang M.P.R.S. III tanggal 11 April 1965, khusus dibidang ekonomi, J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri Brigdjen. A. Jusuf telah menetapkan suatu kebidjaksanaan yang baru khusus-jaja yang menjangkut Perusahaan-Perusahaan Niaga Negara di luar negeri.

Langkah-langkah yang diambil Menteri itu, „DI-RAHKAN” kepada usaha-usaha untuk lebih memertinggi dan menambah efisiensi dari tjara kerdja dan daja-guna Perusahaan-Perusahaan Niaga Negara di luar Negeri, sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada unit-unit tsb.

Setelah mengadakan penjelidikan dan penilaian on the spot) mengenai kegiatan-kegiatan Perusahaan-Perusahaan Niaga Negara yang berkedudukan di luar negeri, J.M. Menteri Brigdjen. A. Jusuf telah menetapkan antara lain penghentian/penutupan kegiatan-kegiatan dari 9 Perusahaan Niaga Negara di luar negeri, pendirian suatu Perusahaan Niaga Negara di Beirut dan mengadakan Trade Representative di Moskow, Paris dan Mexico sebagai berikut :

Menghentikan/menutup segala kegiatan-kegiatan dari 9 (sembilan) Perwakilan Perusahaan Niaga Negara di Eropa Barat, Inggris, Amerika Serikat, Djepang dan Hongkong tersebut dibawah ini :

1. **Central Indonesia Trading Co. Ltd. di London.**
(Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 068/6/MPLN/SK/65 Tahun 1965).
2. **Yuda Niaga Ltd. di London.**
(Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 071/6/MPLN/SK/65 Tahun 1965).
3. **Yuda Niaga Import/Export GmbH di Bremen.**
(Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 073/6/MPLN/SK/65 Tahun 1965).
4. **Dharma Niaga Trading GmbH di Hamburg.**
(Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 076/6/MPLN/SK/65 Tahun 1965).

5. **Yuda Niaga Incorporated di New York.**
(Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 084/6/MPLN/SK/65 Tahun 1965).
 6. **Fatuma Incorporated di San Francisco.**
(Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 086/6/MPLN/SK/65 Tahun 1965).
 7. **Yuda Niaga (Japan) Co. Ltd. di Tokyo.**
(Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 083/6/MPLN/SK/65 Tahun 1965).
 8. **Central Overseas Corporation Ltd. di Hongkong.**
(Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 081/6/MPLN/SK/65 Tahun 1965).
 9. **Eastern Agencies Ltd. di Hongkong.**
(Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 080/6/MPLN/SK/65 Tahun 1965).
- B. Mendirikan Perusahaan Niaga Negara di Beirut dalam bentuk Incorporated.**
(Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 079/6/MPLN/SK/65 Tahun 1965).
- C. Kepada Yuda Niaga Hongkong dan Eastern Agencies Hongkong diperintahkan untuk segera menarik diri dari penjeritaannya dalam Mercantile Shipping Development (M.S.D.) Ltd.**
(Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 082/6/MPLN/SK/65 Tahun 1965).
- D. Mengadakan Trade Representative di :**
1. **Moskow**, untuk Negara-negara Sosialis, dengan menundjuk Sdr. Sukamto Sajidiman sebagai Trade Representative.
(Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 088/6/MPLN/SK/65 Tahun 1965).
 2. **Paris**, dengan menundjuk Sdr. Soeharjono Sahami sebagai Trade Representative.
(Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 078/6/MPLN/SK/65 Tahun 1965).
 3. **Mexico**, dengan menundjuk Sdr. Drs. Koo Liong Bing sebagai Trade Representative.
(Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 090/6/MPLN/SK/65 Tahun 1965).

PEMBELIAN DARI LUAR NEGERI JANG MENGGUNAKAN DEVISA NEGARA

KEPUTUSAN PRESIDIDIUM KABINET REPUBLIK INDONESIA

No. Aa/B/83/65 Tahun 1965

MENIMBANG :

bahwa, dengan dikeluarkannya Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia No. Aa/B/44/65 Tahun 1965 tanggal 29 Maret 1965 dan demi untuk mempertinggi penghematan serta mempermudah pengontrolan atas pengeluaran/pemakaian devisa Negara, maka dianggap perlu untuk menjerahkan pelaksanaan pembelian kebutuhan Departemen²/Instansi² Pemerintah di Luar Negeri jang memakai devisa Negara termasuk deferred payment kepada/melalui Perusahaan² Niaga Negara;

MENINGAT :

1. Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1965;
2. Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia No. Aa/B/44/65 Tahun 1965 tanggal 29 Maret 1965;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Pertama : Semua pembelian di Luar Negeri untuk Departemen²/Instansi² Pemerintah jang menggunakan devisa Negara termasuk deferred payment harus dilaksanakan oleh Perusahaan² Niaga Negara.

Kedua : Implimentasi kontrak Perdagangan harus melalui Departemen Perdagangan Luar Negeri.

Ketiga : Hal² jang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.

Kempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaja setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 11 Djuni 1965.

PRESIDIUM KABINET REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(Dr. SOEBANDRIO)

PROJEK-PROJEK PRODUCTION SHARING.

Djurubitjara Departemen Luar Negeri tgl. 11 Djuni 1965 mengumumkan pengumuman Panitia Kredit atas dasar Production Sharing sebagai berikut :

Wakil Perdana Menteri I Dr Subandrio selaku Ketua Panitia Menteri Urusan Production Sharing dengan surat-surat keputusan: No Kpts. 11/P.T.P.S. — WLN/1965 tahun 1965 tanggal 31 Mei 1965, No Kpts. 12/P.T.P.S. — WLN/1965 tahun 1965 tanggal 31 Mei 1965, No Kpts. 13/P.T.P.S. — WLN/1965 tahun 1965 tanggal 1 Djuni 1965 telah memberi persetujuan atas kontrak-kontrak untuk: Proyek minjak nabati di Djakarta, Proyek rice bran oil di Jawa Barat, Proyek perkajuan, penggergadjian dan galangan kapal di Maluku.

Dengan demikian maka djumlah projek-projek Production Sharing jang hingga sekarang telah mendapat persetujuan lengkap ada 11 buah, dengan djumlah kredit seluruhnya :

US\$. 64.379.784,—.

Diantara projek-projek jang telah "in full operation or implementation" adalah :

Projek Minjak di Sumatra Utara,
Projek Nikkel di Sulawesi Selatan,
Projek Perkajuan di Kalimantan Timur,
Projek Palmoil di Sumatra Timur,
Projek Penggaruk Timah di Bangka-Belitung
Projek Mutiara di Sulawesi Selatan,
Projek Gulapasis di Maluku dan
Projek Perkajuan dan Galangan Kapal di Maluku.

Dari Departemen jang bersangkutan telah di terima untuk pembahasan terakhir 4 buah kontrak.

Syarat-syarat kerdjasama dengan luar negeri atas dasar Production Sharing telah disesuaikan dengan politik ekonomi "Berdikari".

TJARA-TJARA/PROSEDUR IMPOR DI INDONESIA PADA DEWASA INI

ISI:

A. TJARA-TJARA/PROSEDUR IMPOR.

Tjara-tjara impor yang kini berlaku di Indonesia dapat dibagi dalam :

I. *Impor atas beban Dana Devisa Negara (Dana Devisa)* yang terdiri dari :

1. Impor atas beban Rentjana Impor Barang (RIB),
2. Impor atas beban Rentjana Impor Anggaran Belandja (RAB),
3. Impor dengan Surat Pendorong Produksi (SPP),
4. Impor atas beban Alokasi Devisa (AD)
5. Impor dalam rangka pelaksanaan Projek- Projek Pembangunan.

II. *Impor atas beban bukan Dana Devisa Negara*, terdiri dari :

1. Impor dengan Devisa Pelengkap,
2. Impor setjara Surat Persetujuan Impor (SPI)
3. Impor dengan Surat Izin Impor Sabang (SIIS),
4. Impor barang penumpang/kiriman,
5. Impor atas dasar Counter Impor 30% dari hasil ekspor.

III. *Impor dalam rangka Production Sharing.*

B. PENGGOLONGAN EKONOMI BARANG-BARANG IMPOR

C. BEA MASUK ATAS BARANG-BARANG IMPOR.

A. TJARA-TJARA/PROSEDURE IMPOR.

PROSEDUR IMPOR ATAS BEBAN DE- VISA NEGARA.

IMPOR ATAS BEBAN RENTJANA IMPOR BARANG (RIB).

- a. Dengan Rentjana Impor Barang (RIB) dimaksudkan penjediaan sedjumlah devisa dalam Anggaran Devisa Negara untuk impor barang-barang bahan baku/penolong dan spare-parts yang diperlukan terutama oleh perusahaan-perusahaan yang telah ada baik Pemerintah maupun swasta yang bernaung dibawah berbagai Departemen.
- b. Devisa RIB yang tersedia ini didjatakan oleh ("Departemen") Urusan Perdagangan Luar Negeri cq. Direktorat Impor kepada Departemen-departemen dimana bernaung perusahaan-perusahaan yang membutuhkan barang-barang impor, dengan menentukan djenis-djenis barang yang boleh diimpor dengan devisa tersebut.
- c. Untuk melaksanakan impor berdasarkan djatah itu harus diperoleh izin dari Biro Lalu Lintas Devisa, yang prosedurnja pada pokoknja adalah sebagai berikut :
 - 1) Importir mengajukan Permohonan Izin Devisa Impor (PIDI) kepada Biro Lalu

Lintas Devisa (BLLD) melalui Bank Devisa yang akan disertai pembukaan L/C kelak.

- 2) Apabila permohonan disetujui dan memenuhi segala sjarat-sjaratnja maka oleh BLLD disampaikan kepada Bank Devisa : Surat Izin Devisa Impor (SIDI).
- 3) Atas SIDI ini importir menutup Kontrak Valuta (KV) pada Bank Devisa yang bersangkutan seperti : harga devisa, retribusi BLLD untuk impor, sumbangan-sumbangan resmi bila ada disamping biaja-biaja bank.
- 4) Bila disjaratkan oleh supplier diluar negeri, maka biasanja lalu dibuka Letter of Credit (L/C) oleh bank untuk supplier diluar negeri, atas L/C mana pihak supplier dapat menerima pembayaran dengan menjerahkan dokumen-dokumen pengapalan barang-barang yang dipesanjnja.
- 5) Apabila Bank Devisa telah menerima dokumen-dokumen pengapalan asli dari korespondennja diluar negeri, maka importir dapat menerima dokumen-

dokumen tersebut setelah memenuhi pungutan-pungutan yang ditentukan, seperti Pembebanan Wadhib (PW), Sumbangan Dana Revolusi, Sumbangan Djal-an Raya Lintas Sumatra dan sebagainya.

- 6) Oleh importir atau bank atas nama importir dibuat Keterangan Pemasukan Pabean (KPP) yang dikuatkan oleh bank atas nama BLLD.
- 7) Dengan KPP dan dokumen-dokumen asli tadi importir dapat "inklaren" barang-barangnja pada Kantor Bea dan Tjukai di pelabuhan dimana barang-barang itu tiba, dengan memenuhi pembayaran bea masuk dan pungutan-pungutan lainnja seperti SWI (bila terkena), Sumbangan Barang Mewah (SBM) bila terkena dan sebagainya.
- 8) Khusus mengenai daerah, didalam RIB disisihkan suatu djumlah yang merupakan apa yang disebut Djatah Daerah untuk tiap Daerah Tingkat I.

Djatah Daerah ini disediakan untuk pengimporan barang-barang keperluan daerah yang baik djenis barangnja maupun tjara nendjatahannja ditentukan oleh Panitia Koordinasi Pelaksanaan Impor Daerah (PKPID) yang diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Pusat.

2. IMPOR ATAS BEBAN RENTJANA IMPOR ANGGARAN BELANDJA NEGARA (RAB).

- a. RAB adalah djuga penjediaan sedjumlah devisa dalam Anggaran Devisa Negara yang dibebankan langsung atas beban Anggaran Belandja Negara, khusus untuk keperluan impor barang-barang Pemerintah.
- b. Pada dasarnya tiap Departemen diberi antjer-antjer djatah dari RAB tersebut yang pengawasan penggunaannja dilakukan oleh Departemen Urusan Anggaran Negara.
- c. Departemen atau importir yang ditunjuk olehnja yang akan melaksanakan impor atas beban djatahnja itu mengajukan Permohonan Izin Devisa Impor (PIDI)-nja kepada Departemen Urusan Anggaran Negara, yang meneruskannja kepada BLLD apabila pembelian yang bersangkutan dapat disetudjuinja.
- d. Setelah disetudjuji oleh BLLD, maka dikeluarkannja Surat Izin Devisa Impor (SIDI) yang disampaikan kepada Departemen Urusan Anggaran Negara untuk keperluan pengeluaran otorisasi dan Surat Perintah Membayar (SPM)-nja bagi Bank Devisa yang akan menjelenggarakan Pembukaan L/C-nja.
- e. Selanjutnja prosedurnja sama dengan prosedur impor atas beban RIB.

3. IMPOR DENGAN SURAT PENDORONG PRODUKSI (SPP).

- a. Jang disebut Surat Pendorong Produksi (SPP) adalah suatu hak yang diberikan kepada para eksportir untuk membeli sebagian (20%) dari Devisa yang dihasilkan oleh ekspornja, hak mana tidak dapat dijual-belikan dan digunakan untuk impor oleh pemiliknja dalam waktu satu bulan.
- b. Jang boleh mengimpor dengan devisa SPP adalah para eksportir dan importir termasuk perusahaan yang mengimpor sendiri (2 I.B.)
- c. Prosedur impor dengan devisa SPP adalah sebagai berikut:
 - 1) Importir menjampaikan Pernyataan Impor (PI) kepada Bank Devisa dengan melampirkan SPP yang masih berlaku setjukupnja dan membayar devisanja (US\$ 1.— = Rp. 250,— yang disebut Nilai Transaksi Rupiah = NTR),
 - 2) Atas PI tersebut dibuka L/C yang diperlukan dan selanjutnja prosedur pada umumnja sama dengan impor atas bebar RIB.
- d. Perlu ditjatat disini bahwa barang-barang yang dapat diimpor dengan SPP adalah hanja barang-barang yang termasuk golongan ekonomi I, II dan III sebagaimana tertjantum dalam Peraturan Pelaksanaan Direktorat Impor tanggal 17 Mei 1965 No. 246/Kep. DIM/65 dan tanggal 18 Mei 1965 No. 252/Kep. DIM/65.

(Untuk keterangan-keterangan lainnja mengenai Peraturan-peraturan Djual Beli SPP telah dimuat dalam WARTA PERDAGANGAN No. 2/1965/Red.).

4. IMPOR DENGAN ALOKASI DEvisa.

- a. Jang disebut Alokasi Devisa (AD) adalah suatu djatah devisa yang diberikan kepada produsen eksportir nasional dan produsen produsen barang-barang ekspor sebanyak 5% dari djumlah devisa yang dihasilkan oleh ekspor yang bersangkutan.
- b. Alokasi Devisa ini berlaku sama dengan SPP tidak dapat diperjual-belikan dan pemakaiannja diatur sebagai berikut:
 - 1) Para produsen eksportir nasional setjara otomatis menerima 5% AD dari djumlah devisa yang dihasilkan ekspornja dan dapat menggunakannya untuk impor dengan tjara seperti SPP, jaitu dengan mengajukan PI kepada Bank Devisa.
 - 2) Para produsen barang-barang ekspor akan menerima barang-barang impor yang dibutuhkannja dalam produksi barang-barang ekspornja melalui Departemen

departemen dimana mereka bernaung, segala sesuatu atas ketentuan Team Alokasi Devisa. Pengimporannya dilakukan dengan prosedur yang sama seperti impor atas beban RIB (memakai PIDI, SIDI dan KPP).

IMPOR DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN.

Impor ini adalah impor barang-barang yang diperlukan untuk proyek-proyek yang telah disetujui oleh Pemerintah dalam rangka pembangunan Semesta Berentjana. Pada umumnya pelaksanaan impor ini didasarkan atas kredit luar negeri jangka panjang. Prosedur impornya sama dengan prosedur yang ditetapkan untuk pelaksanaan impor RIB.

1. PROSEDUR IMPOR ATAS BEBAN BUKAN DEvisa NEGARA.

IMPOR DENGAN DEvisa PELENGKAP.

- a. Yang dimaksudkan dengan Devisa Pelengkap adalah devisa yang dimiliki seseorang diluar apa yang harus ia serahkan kepada Dana Devisa menurut peraturan-peraturan yang kini berlaku.
- b. Untuk memakai devisa ini untuk impor barang-barang disarutkan penjetorannya lebih dahulu pada Bank Devisa kedalam suatu rekening valuta asing yang disebut "rekening DPA" apabila devisa yang langsung diperoleh dari luar negeri atau dari pembayaran dja pada orang asing dalam negeri atau "rekening DBP" apabila devisa yang berasal dari pembelian dengan Rupiah/uang kertas asing yang beredar dalam negeri.
- c. Penggunaan untuk impor adalah tanpa sesuatu izin dan dapat dilakukan dengan pembukaan L/C atas beban rekening DPA/DPB tersebut atau dengan tjara "Document Against Payment" (collection).
- d. Inklaring barangnya memerlukan KPP dan dokumen-dokumen pengapalan yang langsung diterima oleh Bank Devisa bersangkutan.
- e. Barang-barang yang boleh diimpor dengan Devisa pelengkap adalah barang-barang Golongan Ekonomi I s/d IV, dengan memperhatikan larangan-larangan/pembatasan-pembatasan yang ada.

IMPOR DENGAN SURAT PERSETUDJUAN IMPOR.

Bagi mereka yang mempunyai devisa diluar negeri dan hendak menggunakannya untuk impor barang-barang, dimungkinkan melakukannya dengan tjara impor ini yang prosedurnya adalah sebagai berikut :

- a) Sebagai bukti dimilikinya devisa dan pula sebagai sumbangan kedalam Dana Stabilisasi maka yang bersangkutan mentransfer 1% dari jumlah devisa yang akan dipergunakan untuk impor itu melalui salah satu koresponden Bank Indonesia diluar negeri dalam valuta asing.
- b) Kemudian pemohon mengajukan Permohonan Surat Persetudjuan Impor (PSPI) kepada Bank Indonesia Bagian Ekspor Impor dilampiri Nota transfer tersebut.
- c) Bank Indonesia mengeluarkan Surat Persetudjuan Impor yang bersangkutan setelah mejakini bahwa barang-barang yang akan diimpornya hanja termasuk Golongan Ekonomi I, II dan III.
- d) Dengan keluarnya SPI tersebut maka yang bersangkutan dapat segera mendatangkan barang-barangnya yang setelah tiba dapat dikeluarkan dengan membuat KPP barang, yang pada pokoknya sama dengan KPP impor atas beban RIB.
- e) Setelah Bea Tjukai menerangkan pada SPI nilai valuta barang-barang yang telah dimasukkan dan ini mentjapai sekurang-kurangnya 90% dari jumlah devisa yang tertera pada SPI, maka yang bersangkutan diperbolehkan mengimpor dengan SPI djuga barang-barang dari Golongan Ekonomi IV yang ditentukan oleh Departemen Urusan Perdagangan Luar Negeri sebanjak 10% dari nilai barang-barang yang telah dimasukkan dengan SPI yang pertama.

3. IMPOR DENGAN SURAT IZIN IMPOR SABANG (SIIS).

Sesungguhnya tjara ini adalah tidak lain daripada tjara Surat Persetudjuan Impor (SPI) akan tetapi khusus dari Sabang yang berstatus "freeport". Sebagai Incentive tambahan disini tidak disyaratkan pentransferan devisa sebanjak 1% untuk Dana Stabilisasi dan jumlah devisa yang dapat dipakai untuk impor barang Golongan I, II, III adalah 30% dari nilai impor barang-barang Golongan I, II, III.

Barang-barang yang didatangkan dari Sabang dengan SIIS ini harus dikuatkan dengan Sertipikat Asal Barang Lewat Sabang (SABIS) yang dikeluarkan oleh Komando Pelaksana Pembangunan Proyek Pelabuhan bebas Sabang.

4. IMPOR ATAS DASAR COUNTER IMPOR 30% DARI HASIL EKSPOR.

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 057/5/MPLN/SK/65 yang mulai berlaku tgl. 31 Mei 1965, barang² yang dapat diimpor atas dasar Counter ini adalah barang-barang yang termasuk dalam lampiran Peraturan Direktorat Impor tgl. 17

Mei 1965 No. 246/Kep. DIM/65 dan tanggal 18 Mei 1965 No. 252/Kep. DIM/65.

(Untuk keterangan² lainnja telah dimuat dalam "WARTA PERDAGANGAN" No. 2 dan No. 3. Red.).

5. IMPOR BARANG PENUMPANG/KIRIMAN.

Pada tjara impor ini sesungguhnya tiada persyaratan apa-apa ketjuali pembajaran suatu pungutan tambahan atas segala bea-masuk, pungutan dan sumbangan jang telah ada berupa Retribusi Khusus Impor jang besarnja tergantung dari nilainja tiap kiriman/djumlah barang sekali bawa dan sifat barang-barang : barang dagangan atau barang untuk pakai sendiri; jaitu sebagai berikut :

1. BARANG PENUMPANG PRIBADI.

- a. dibawah umur 18 tahun b. lainnja bea masuk Ret. Khusus Impor
- | | |
|----------------------|----------------------|
| s/d US \$ 50.— | s/d US \$ 100.— |
| bebas | Rp. 45,—/US \$ |
| s/d US \$ 250.— | s/d US \$ 500.— |
| dikenakan | Rp. 250.—/US \$ |
| melebihi US \$ 250.— | melebihi US \$ 500.— |
| dikenakan | Rp. 500.—/US \$ |

B. PENGGOLONGAN EKONOMI BARANG-BARANG IMPOR.

1. Untuk menentukan kebidaksanaan dalam penetapan djenis-djenis barang jang dapat diimpor dalam rangka pembangunan dan produksi dalam negeri, telah diadakan pembagian barang-barang impor dalam Golongan-golongan Ekonomi.
2. Telah ditetapkan 4 Golongan Ekonomi, jaitu :
Golongan I : jang pada umumnja meliputi bahan-bahan baku/penolong bagi kepentingan umum.
Golongan II : bahan baku/penolong untuk produksi ekspor dan infrastruktur.
Golongan III : bahan baku/penolong dan spare parts untuk alat produksi dalam negeri lainnja.

C. BEA MASUK ATAS BARANG-BARANG IMPOR.

1. Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1964 telah ditetapkan pembebanan atas barang-barang Impor.
2. Tarif Bea Masuk ditetapkan sebesar :
 - a. 0 % untuk barang-barang jang sangat esensiil;
 - b. 50 % untuk bahan baku, barang setengah djadi dan alat-alat jang diperlukan untuk pembuatan barang-barang jang akan menghasilkan valuta asing ataupun jang pembuatannja didalam negeri akan menghemat penggunaan devisa, termasuk alat-alat transpor dan komunikasi;

2. BARANG PENUMPANG DAGANGAN.

s/d US\$ 100.—	kena	Rp. 45,—/US \$
melebihi US\$ 100.—	kena	Rp. 1.350,—/US \$

3. BARANG KIRIMAN.

s/d US\$ 10.—	bebas	Rp. 45,—/US \$
s/d US\$ 25.—	kena	Rp. 250,—/US \$
melebihi US\$ 25.—	kena	Rp. 1.350,—/US \$

4. BARANG KIRIMAN CHUSUS.

s/d US\$ 100.—	kena	Rp. 45,—/US \$
melebihi US\$ 100.—	kena	Rp. 250,—/US \$

III. PROSEDURE IMPOR DALAM PRODUCTION SHARING.

Jang dimaksudkan dengan Production Sharing adalah suatu kerdjasama antara pihak luar negeri dengan produsen dalam negeri, dimana pihak luar negeri ikut serta dalam produksi dengan djelas memberikan perlengkapan alat-alat produksi jang diperlukan beserta technical know how-nja dan pembajaran kembalinja akan dilakukan dengan penerimaan devisa dari ekspor barang-barang jang dihasilkan. Prosedur pengimporannja ditentukan setjara khusus dengan keputusan BLLD, menjimpang dari prosedur jang ada.

Golongan IV : barang-barang lainnja jang sifatnja tidak esensiil dan/atau mewah.

3. Selandjutnja ada satu daftar barang-barang jang untuk mengimpornja memerlukan izin khusus dari Menteri Perdagangan cq Direktorat Impor (jang disebut barang-barang golongan V sesuai Keputusan Menteri Perdagangan No. 105/M. SK/64 tanggal 22 April 1964 sebagaimana telah diubah dan ditambah).
4. Pembagian barang-barang impor dalam golongan-golongan ekonomi ini adalah terlepas dari golongan-golongan barang-barang impor untuk keperluan pembebanan jang dikeluarkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1964.

- c. 100% untuk bahan baku, barang setengah djadi dan alat-alat jang diperlukan untuk pembuatan barang-barang jang ditudjukan untuk konsumsi didalam negeri;
- d. 300% untuk barang-barang djadi untuk konsumsi didalam negeri jang tidak bersifat mewah;
- e. 800% untuk barang-barang djadi untuk konsumsi jang bersifat mewah.

3. Bea masuk menurut tarif tersebut diatas, dihitung atas dasar nilai transaksi rupiah untuk impor, jaitu Rp. 250,— per US\$ 1.—.

Djakarta, 22 Djuni 1965.

ORGANISASI DAN SUSUNAN DIREKTORAT METROLOGI

Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri
No. 028/MPDN/SK/65.

MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI,

Menimbang :

bahwa dengan surat keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri tanggal 9 April 1965 No. 001/MPDN/SK/65 telah ditetapkan susunan dan tugas Departemen Perdagangan Dalam Negeri;

bahwa dalam surat keputusan tersebut telah ditetapkan pula tugas Direktorat Metrologi;

bahwa susunan dan tugas dari bagian Direktorat Metrologi perlu segera ditetapkan dan disesuaikan dengan prinsip² bekerja setjara efisien serta berlandaskan susunan dan tugas yang efisien pula;

Mengingat :

Surat Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri tanggal 9 April 1965 No. 001/MPDN/SK/65;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Bagian² Direktorat Metrologi serta tugasnya sebagai berikut :

Pasal 1

Direktorat Metrologi dipimpin oleh Kepala Direktorat Metrologi yang dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari² dibantu oleh Wakil Kepala Direktorat Metrologi.

Pasal 2

Direktorat Metrologi terdiri atas :

- i Pusat :
1. Bagian Teknik.
 2. Bagian Pendidikan.
 3. Lembaga Ukur.
 4. Bagian Tata-Usaha.

i Daerah : Kantor² Inspeksi dengan wilayah-tertera masing² sebanyak 20 wilayah.

Pasal 3

Kegiatan-kegiatan Bagian Teknik antara lain adalah :

Melaksanakan dan memelihara pekerjaan administratif teknis.

Memelihara inventaris dan instrumentarium Direktorat dan menjediakan alat² tera untuk Kantor² Inspeksi.

Mengadakan penyelidikan dilapangan teknik mengukur atas dasar ilmu metrologi.

Mengusahakan certificate of weight untuk barang² ekspor.

Mengadakan hubungan dengan lembaga² internasional yang bergerak dilapangan metrologi.

Pasal 4

Kegiatan-kegiatan Bagian Pendidikan antara lain adalah :

Menjenggarakan „Akademi Metrologi”.

b. Melaksanakan pendidikan tenaga² teknis lainnya untuk Direktorat.

c. Memelihara hubungan dengan perguruan² tinggi dan akademi² lainnya yang ada hubungannya dengan metrologi.

d. Membina Sworn weighers yang dapat diakui setjara internasional.

Pasal 5

Kegiatan-kegiatan Lembaga Ukur antara lain adalah :

a. Membina Lembaga Ukur dalam arti kata yang seluas-luasnya hingga mentjapai taraf internasional.

b. Mengusahakan perlengkapan dan memelihara instrumentarium Lembaga Ukur.

c. Menjenggarakan research dalam lapangan teknik mengukur atas dasar ilmu metrologi.

d. Melaksanakan pekerjaan pemeriksaan khusus atas permintaan pihak ketiga.

Pasal 6

Kegiatan-kegiatan Bagian Tata-Usaha antara lain :

a. Melaksanakan dan memelihara pekerjaan administratif sehari-hari urusan umum dan rumah tangga Direktorat.

b. Mengurus hal² mengenai kepegawaian dan keuangan menurut peraturan Pemerintah dan berdasarkan kebijaksanaan kepegawaian dalam lingkungan Direktorat.

Pasal 7

Kegiatan-kegiatan Kantor² Inspeksi antara lain adalah :

a. Menerima dan menera-ulang alat² timbangan dan ukuran/takaran, khususnya, yang dipakai untuk keperluan perdagangan.

b. Mengawasi agar alat² termaksud pada sub. a, ayat ini mempunyai tanda-tera yang sah serta melakukan pengawasan atas pemakaiannya oleh umum.

c. Melaksanakan pemberian certificate of weight atas petundjuk² dari Bagian Teknik (Pusat).

Pasal 8

Kepala Direktorat Metrologi memberi instruksi²/petundjuk² yang bersifat teknis dan administratif kepada Kepala² Kantor Inspeksi didaerah-daerah.

Pasal 9

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan : di Djakarta

Pada tanggal : 24 April 1965.

MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI,

ttd.

A. Jusuf

(Brig. Djendral T.N.I.).

PEMBENTUKAN KOMPARTIMEN MARITIM

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 156 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa untuk mengembalikan Bangsa Indonesia menjadi Bangsa Bahari yang benar-benar dapat menguasai kedjaan dan kekajaan Maritim Indonesia, serta untuk memperlan-tjar pelaksanaan prinsip „BERDIKARI”, perlu membentuk suatu Kompartimen Mari-tim, yang meliputi Departemen Perhubungan Laut, Departemen Perikanan dan Pengolahan Laut dan Departemen Perindustrian Maritim;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu mengeluarkan :
 1. Departemen Perhubungan Laut dari Ling-kungan Kompartimen Distribusi,
 2. Departemen Perikanan Darat/Laut dari lingkungan Kompartimen Pertanian dan Agraria, untuk selandjutnja dimasukkan kedalam lingkungan Kompartimen Mari-tim;

Mengingat :

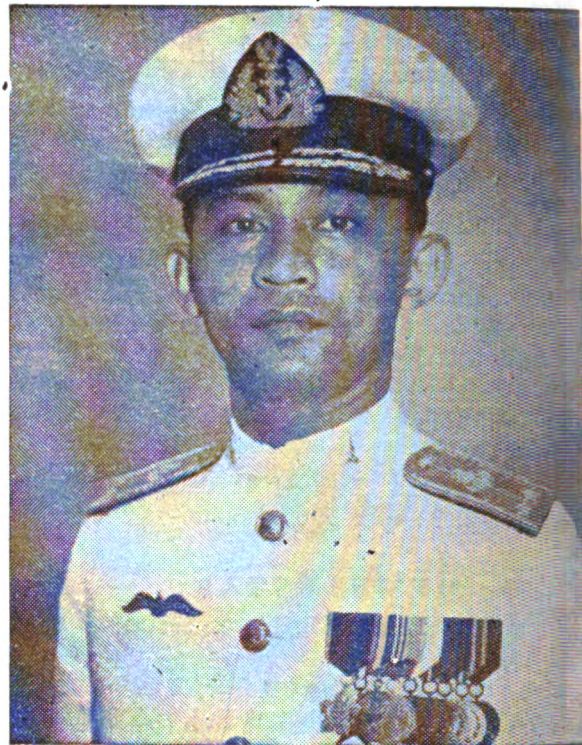
1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964 tentang pembentukan Kabinet Dwikora yang kemudian berulang-ulang telah diubah dan ditambah terachir dengan Keputusan Presi-den No. 141 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

- A. Mengeluarkan Departemen Perhubungan Laut dari Lingkungan Kompartimen Distri-busi dan Departemen Perikanan Darat/Laut dari lingkungan Kompartimen Pertanian dan Agraria.
- B. Membentuk Kompartimen Maritim yang me-liputi 3 Departemen terdiri dari :
 1. Departemen Perhubungan Laut,
 2. Departemen Perikanan dan Pengolahan Laut,
 3. Departemen Perindustrian Maritim.
- C. Mengangkat :
 1. Major Djenderal KKO Ali Sadikin, Menteri Perhubungan Laut,



*J.M. Menko Kompartimen Maritim,
Maj. Djen. KKO ALI SADIKIN*

- menjadi Menteri Koordinator Kompartimen Maritim merangkap sebagai Menteri Perhubungan Laut,
- 2. Laksamana Muda Laut Hamzah Atmohandojo, Menteri Perikanan Darat/Laut
- menjadi Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut,
- 3. Sdr. Mardanus, Presiden Direktur „Karya Putra Dockyard”
- menjadi Menteri Perindustrian Maritim

KEDUA :

Surat Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 7 Djuni 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUKARNO.

INDONESIA AKAN KUAT, SENTAUSA SERTA ADIL DAN MAKMUR DJIKA BANGSA INDONESIA KEMBALI MENGARUNGI LAUTAN

Presiden Sukarno menjatakan, bahwa bangsa Indonesia telah berdiri didepan pintu gerbang kebesaran dengan telah terbentuknja Kompartimen Maritim jang dimaksudkan untuk mengembalikan bangsa Indonesia mendjadi bangsa bahari. Dalam hal ini Presiden mengharapakan dengan sangat, agar bangsa Indonesia mengerti betul-betul, karena berdasar geopolitik Indonesia, negara kita akan kuat, sentausa serta adil dan makmur apabila bangsa Indonesia kembali mendjadi bangsa pelaut, mendjadi bangsa jang mengarungi lautan.

Presiden Sukarno mengemukakan hal tersebut dalam amanatnja pada upatjara peresmian Kompartimen Maritim dengan pelantikan menteri-menteri baru Mardanus dan Ir. Sutami, dan pelantikan Dewan Distribusi Nasional di Istana Bogor pada tanggal 12-6-'65. Upatjara pelantikan tersebut dihadiri oleh para Wakil Perdana Menteri, Para Menko dan Menteri Kabinet Dwikora serta pedjabat dilingkungan Kompartimen Maritim dan Kompartimen PUT.

Dalam awal amanatnja Presiden Sukarno menjatakan, bahwa tindakannja untuk memetjah beberapa Kompartimen atau Departemen serta mengadakan Badan-badan Dewan-dewan adalah untuk memperinggi efisiensi pemerintah atau aparaturnegara dengan prinsip Berdikari.

Ditegaskannja, bahwa djika kita hendak benar-benar mengemban trikerangka revolusi kita, terutama untuk memenuhi kerangka pertama, harus sanggup hidup atas prinsip berdiri atas kaki sendiri.

Dikatakannja, bahwa dalam pembijtaraan-pembijtaraan dengan para pemimpin negara khususnya dari A-A, mereka tidak hanja mengagumi utjapan Presiden jang menjatakan bahwa mahkota kemerdekaan tidak terletak pada keanggotaan PBB, tetapi pada kesanggupan berdiri atas kaki sendiri. Rekan-rekan Presiden Sukarno tersebut bahkan menjatakan utjapan itu mendjadi penjegar dalam perdjoangan mereka dalam mentjapai kemerdekaan nasionalnja.

Berbitjara tentang Sosialisme Indonesia, Presiden Sukarno mengemukakan sjarat mutlak jang harus dipenuhi, yakni produksi, terutama produksi kebutuhan rakjat dalam arti jang seluas-luasnja dan seinggi-tingginja, dan distribusi yakni distribusi jang adil dan merata. Oleh karena itu — demikian Presiden — dibentuknja Dewan Distribusi Nasional, jang diharapkan akan dapat melaksanakan tjita-tjita bangsa Indonesia, jaitu masyarakat adil dan makmur serta merata.

Dikatakan selandjutnja oleh Presiden, bahwa pokok dari pokok tjita-tjita kita adalah mendirikan negara Indonesia jang kuat sentausa materiil dan idiil dengan susunan masyarakat adil dan makmur, tanpa adanya penindasan manusia atas manusia.

Ditegaskan oleh Presiden, bahwa sedjarah telah membuktikan, bangsa Indonesia kuat sentausa sedemikian pada waktu bangsa Indonesia masih menguasai lautan. Pada saat itu Indonesia dapat mendirikan keradjaan Sriwidjaja dan Madjapahit dan bahkan mempunyai hubungan dengan keradjaan Champa jang kini bernama Kambodja. Kalau Indonesia mempunyai Purnawarman dan Aditiawarman, maka Kambodja memiliki Jayawarman. Ini adalah tulisan sedjarah, bahkan saat itu hubungan dagang Indonesia sampai ke pantai Timur Afrika dan hampir mentjapai pantai Barat Amerika.

Dinjatakan oleh Presiden, bahwa ledakan besar terakhir daripada djiwa kelautan bangsa Indonesia tertjatat pada tahun 1011, dimana Adipati Junus memimpin suatu armada jang terdiri dari 500 kapal lajar untuk menggempur imperialisme Portugis di daerah Utara, tepatnja di Malaka. Adipati Junus ini dimakamkan didekat mesdjid Demak, dan oleh rakjat sekitar itu dikenal dengan nama Pangeran Sabrang Lor karena ia pernah „meluruk” musuh ke Utara.

Dikatakan selandjutnja, bahwa setelah itu tidak ada lagi ledakan-ledakan besar dari djiwa kelautan bangsa Indonesia, hal ini disebabkan karena antara lain timbulnja pertentangan-pertentangan dan kontradiksi, dimana djaman Hindu mulai didesak oleh individualisme Islam. Dan pada waktu itulah imperialisme Barat masuk dengan mudah ke daerah Indonesia. Ini mungkin, demikian Presiden, karena bangsa Indonesia sudah mendjadi lemah karena melupakan djiwa kelautannja disebabkan pengaruh konflik-konflik jang timbul dewasa itu.

Maka mendjadi kewadajiban kitalah djika hendak membangun bangsa Indonesia baru, membangunkan kembali djiwa kelautan bangsa kita, mendjadikan bangsa kita kembali mendjadi bangsa bahari. Untuk itu dibentuklah Kompartimen Maritim jang tidak sadja untuk menguasai bidang perhubungan laut, tetapi sampaipun seisi-isinja laut harus kita kuasai sepenuhnya. Demikian Presiden, jang dalam hal ini memintakan pengertian betul-betul dari seluruh masyarakat Indonesia, karena dengan telah terbentuknja Kompartimen Maritim, bangsa Indonesia telah berdiri didepan pintu gerbang kebesaran. Dan untuk itu Presiden mengharapakan dan mempertjajakan kepada para Menteri dalam lingkungan Kompartimen tersebut serta bantuan sepenuhnya dari seluruh bangsa Indonesia.

„Go ahead, kita sebetulnja berpatju dengan waktu, karena abad ke-20 sekarang ini adalah abad kilat”, demikian pesan Presiden Sukarno dalam mengachiri amanatnja. (Antara).

Armada Niaga Dunia

Untuk sekedar mendapat gambaran mengenai Armada Niaga dari negara-negara tertentu berikut ini diberikan suatu Daftar kapal-kapal Niaga yang berukuran 1.000 gross ton keatas, berdasarkan keadaan per 1 Djanuari 1964.

Selanjutnja ditjantumkan pula mengenai djumlah dan dead weight tons dari kapal-kapal niaga beserta data mengenai tankers; dalam angka-angka ini TIDAK termasuk kapal-kapal niaga yang dimiliki oleh angkatan bersendjata, kapal rambu dan lain-lain kapal yang tidak dipergunakan untuk keperluan perniagaan.

Negara	Tankers					Negara	Tankers				
	Djumlah kapal	Gross tons (ribuan)	Dead Weight tons	Djumlah	Dwt. (ribuan)		Djumlah kapal	Gross tons (ribuan)	Dead Weight tons	Djumlah	Dwt. (ribuan)
1. Amerika Serikat	2.656	22.520	30.509	384	7.792	42. Peru	27	123	184	5	40
2. Inggris	2.206	20.138	26.510	521	11.747	43. Uruguay	18	100	151	4	64
3. Norwegia	1.401	13.417	20.014	482	10.901	44. Colombia	23	90	131
4. Liberia	967	12.770	20.705	385	12.337	45. Rumania	16	82	113	2	38
5. Djepang	1.267	8.676	12.893	230	4.427	46. Honduras	19	81	108
6. Junani	828	6.781	9.988	100	2.466	47. Ghana	12	78	103
7. Uni Soviet	1.124	5.397	7.032	184	2.143	48. Islandia	23	61	79	1	17
8. Italia	609	5.049	6.830	145	2.896	49. Maroko	13	50	73
9. Perantjis	604	4.809	6.297	156	3.241	50. Birma	9	47	62
10. Djerman Barat	863	4.787	6.834	46	1.136	51. Nigeria	7	42	68
11. Nederland	527	4.597	6.176	101	2.538	52. Saudi Arabia	11	32	46	1	13
12. Panama	521	3.967	6.054	144	3.367	53. Kuwait	2	31	49	1	46
13. Swedia	507	3.951	5.619	89	2.119	54. Albania	7	30	41
14. Denmark	346	2.199	3.132	55	1.288	55. Iran	4	28	40
15. Spanjol	338	1.579	2.089	62	804	56. Ecuador	7	23	33	1	2
16. India	191	1.278	1.842	5	122	57. Costarica	5	16	25
17. Argentina	165	1.134	1.522	67	810	58. Muang Thai	5	14	21
18. Brasilia	233	1.110	1.572	48	609	59. Nicaragua	5	14	21
19. Finlandia	246	889	1.334	30	435	60. Hongaria	12	14	15
20. Polandia	163	875	1.253	7	114	61. Dominika	5	13	20	1	3
21. Libanon	171	870	1.324	—	—	62. Irak	2	12	17
22. Jugoslavia	162	866	1.265	9	91	63. Malagasi	4	12	16
23. Belgia	81	711	965	13	302	64. Guinea	1	11	15
24. Turki	124	636	836	12	185	65. Jamaica	2	12	9
25. R.R.T.	165	592	793	17	64	66. Monaco	2	12	19	1	10
26. Portugal	90	560	665	12	239	67. Somali	1	7	11
27. Australia	99	446	591	1	15	68. Sudan	2	9	12
28. Djerman Timur	62	417	557	10	143	69. Guatemala	2	4	6
29. Philipina	72	393	532	6	18	70. Aldjazair	1	3	3
30. Indonesia *)	103	325	375	8	30	71. Ethiopia	2	3	5
31. Pakistan	43	285	386	2	31						
32. Venezuela	35	283	401	15	290						
33. Chili	52	268	376	7	117						
34. Meksiko	40	240	345	24	278						
35. Kanada	59	238	243	14	119						
36. R.P.A.	47	212	266	9	109						
37. Selandia Baru	58	197	229	1	3						
38. Switzerland	28	184	264						
39. Bulgaria	31	161	240	7	81						
40. Irlandia	21	137	187	3	39						
41. Kuba	33	134	186	2	6						

*) Tjatatatan terachir keadaan th 1965.

1. Armada Niaga Samudra :

- a. Djakarta Lloyd 38 kapal — 324.000 dwt.
- b. Pelajaran Swasta 6 kapal — 28.000 dwt.

2. Armada interinsuler :

- a. P.N. Pelni 86 kapal — 150.000 dwt.
- b. Pelajaran Swasta 250 kapal — 152.000 dwt.

PEMBENTUKAN KOMPARTIMEN URUSAN AGAMA DAN PERUBAHAN SUSUNAN KOMPARTIMEN KEUANGAN.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 180 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melandjutkan usaha untuk penjemputan mempertinggi daja-kerdja Kabinet Dwikora dewasa ini, dipandang perlu untuk mengadakan reorganisasi Kabinet dengan djalan membentuk suatu Kompartimen Urusan Agama dan meninjau kembali susunan Kompartimen Keuangan jang sekarang beserta menambah djumlah Menteri jang diperbantukan pada Presidium Kabinet Dwikora;
- b. bahwa sebagai realisasi daripada jang tersebut pada sub a diatas Kompartimen Urusan Agama jang akan dibentuk itu akan meliputi :
 - Departemen Agama;
 - Departemen Urusan Hadji;
 - Departemen Hubungan Pemerintah dengan Alim Ulama;Kompartimen Keuangan sesudah diadakan pergeseran intern dan pengintegrasian dari beberapa P.N. ahirnja terdiri dari :
 - Departemen Urusan Bank Sentral;
 - Departemen Urusan Anggaran Negara;
 - Departemen Iuran Negara;
 - Departemen Urusan Perasuransian;

Mengingat :

Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 tahun 1964 tentang pembentukan Kabinet Dwikora jang telah beberapa kali diubah/ditambah terachir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 156 tahun 1965.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

- A. Membentuk Kompartimen Urusan Agama jang meliputi :
 - I. Departemen Agama;
 - II. Departemen Urusan Hadji;
 - III. Departemen Hubungan Pemerintah dengan Alim Ulama;
- B. Mengeluarkan Departemen Agama dan Urusan Hubungan Pemerintah dengan Alim Ulama dari Kompartimen Kesedjahteraan dan memasukkannja kedalam lingkungan Kompartimen Urusan Agama tersebut huruf A diatas.

KEDUA :

- Mengubah susunan Kompartimen Keuangan sehingga mendjadi terdiri dari :
- I. Departemen Urusan Bank Sentral;
 - II. Departemen Urusan Anggaran Negara;
 - III. Departemen Iuran Negara;
 - IV. Departemen Urusan Perasuransian;

KETIGA :

- A. 1. Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI mendjadi Menteri Koordinator Kompartimen Urusan Agama merangkap Menteri Agama.
2. Prof. K.H. FARID MA'RUF mendjadi Menteri Urusan Hadji.
3. K.H. MOH. ILJAS mendjadi Menteri Urusan Hubungan Pemerintah dengan Alim Ulama.
4. K.H. FATTAH JASIN mendjadi Menteri Negara diperbantukan pada Menko Kompartimen Urusan Agama.
- B. 1. SUMARNO S.H. mendjadi Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan.
2. JUSUF MUDA DALAM mendjadi Menteri Urusan Bank Sentral.
3. Drs. SURJADI mendjadi Menteri Urusan Anggaran Negara.
4. Brig. Dien. Polisi Drs. HUGENG IMAN SANTOSO mendjadi Menteri Iuran Negara.
5. SUTJIPTO S. AMIDHARMO mendjadi Menteri Urusan Perasuransian.
- C. H. AMINUDDIN AZIS mendjadi Menteri diperbantukan pada Presidium Kabinet Dwikora.

KEEMPAT :

Memberhentikan dengan hormat MOHAMMAD HASSAN dan K.H. FATTAH JASIN masing-masing dari djabatannja sebagai Menteri Pendapatan, Pembiajan dan Pengawasan dan Menteri Penghubung Alim Ulama, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja jang telah disumbangkan kepada Negara selama memangku djabatan-djabatan tersebut.

KELIMA :

Kompartimen Keuangan disusun sedemikian rupa, sehingga P.N. Pegadaian, P.N. Arta Jasa dan Urusan Kas Negara diintegrasikan kedalam Departemen Urusan Bank Sentral, sedangkan Urusan Pembiajan jang selama ini masuk Departemen Pendapatan, Pembiajan dan Pengawasan disatukan dalam Departemen Urusan Anggaran Negara.

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Djuni 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

**UPATJARA PERESMIAN KOMPARTIMEN AGAMA DAN PENJUSUNAN KEMBALI KOMPARTIMEN KEUANGAN:
SEMBOJAN BERDIKARI MENGGELEGAR GEMANJA DI ASIA DAN AFRIKA**



J.M. Menko Kompartimen Keuangan SUMARNO S.H.

Presiden Sukarno menandakan, bahwa sembojan Berdikari yang didengungkannya di Indonesia kini gemanja menggelegar diseluruh benua Asia dan Afrika, sehingga membuat kaum imperialis ketakutan serta ingin pula menggagalkan Konperensi AA-II.

Apa yang membuat kaum imperialis ketakutan terhadap sembojan itu ialah, karena sifat dan inti imperialis sendiri ialah membuat semua bangsa tidak sanggup berdikari, sehingga terus menggantungkan dirinja kepada kekuasaan imperialis.

Menurut Presiden, sebagaimana kata-kata Bung Karno "go to hell with your aid" terhadap bantuan imperialis yang telah mendapatkan gema di benua Asia dan Afrika kinipun sembojan „Berdikari" menggelegar pula dikedua benua itu, karena terasa ketepatannya arti sembojan itu.

Penandasan Presiden itu diutjapkan dalam amanatnya ketika melantik Menteri-Menteri baru Kabinet Dwikora dalam suatu upatjara yang berlangsung di Istana Merdeka pada tgl. 21-6-1965. Pengangkatan Menteri-Menteri baru itu adalah dalam rangka pembentukan Kompartimen Agama dan penjusunan kembali Kompartimen Keuangan.

Pelantikan tersebut meliputi: Kompartimen Agama, dengan Menko Prof. K.H. Saifuddin Zuhri; Departemen Agama dengan Menteri K.H. Saifuddin Zuhri; Departemen Urusan Hadji dengan Menteri K.H. Farid Ma'ruf; Departemen Urusan Hubungan Pemerintah dengan Alim Ulama dengan Menteri K.H.M. Iljas; dan Menteri diperbantukan kepada Menko Urusan Agama, K.H. Fattah Jasin.

Kompartimen Keuangan, dengan Menko Sumarno SH; Departemen Bank Sentral dengan Menteri Jusuf Muda Dalam; Departemen Anggaran dengan Menteri Drs Surjadi; Departemen Iuran Negara dengan Menteri Brigdjen Pol. Hugeng Iman Santoso; dan Departemen Perasuransian dengan Menteri Sutjipto Amidarmo.

Pada upatjara itu Presiden melantik pula H. Amiquddin

Azis sebagai menteri diperbantukan pada Presidium Kabinet, dan Prof. G.A. Siwabessy sebagai Direktur Djendral Badan Tenaga Atom dengan pangkat Menteri. Kepala Negara mengatakan, bahwa perdojangan revolusi kita yang besar dan simultan itu kini makin meningkat tetapi kita yakin bahwa perdojangan ini pasti berhasil dengan kemenangan karena revolusi kita objektif merupakan hasil pengerahan tenaga bangsa kita.

Ditegaskannya, bahwa dengan Lima Azimat maka revolusi kita pasti dapat diselesaikan; adapun Lima Azimat itu adalah :

1. Persatuan rakjat dengan Nasakom;
2. Pantjasila;
3. Manipol;
4. Trisakti Tavip, jaitu berdaulat dalam politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan;
5. Berdikari.

Menurut Presiden, sembojan Berdikari yang gemanja kini menggelegar di Asia dan Afrika amat ditakuti oleh kaum imperialis. Djika terhadap KAA-I kaum imperialis sudah ketakutan, maka terhadap KAA-II semakin takut lagi. Dinegara-negara AA memang kaum imperialis mempunyai banjak investment dan pasarannya, sehingga kaum imperialis itu takut akan kehilangan modalnya. Di Indonesia sudah banjak modal imperialis yang ditendang keluar.

Mengenai pelaksanaan Berdikari, Presiden menandakan perlu didjalankan perbaikan semua aparaturnegara. Pembentukan Kompartimen Agama dan penjusunan kembali Kompartimen Keuangan itupun adalah dalam rangka perbaikan semua aparaturnegara.

Tidaklah perlu diherankan djika dalam waktu dekat ini akan ada satu urusan pemerintahan yang akan saja „split" lagi, kata Kepala Negara, tetapi „wait and see". Demikian Presiden. (Antara).



**J.M. Menko Kompartimen Urusan Agama
Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI.**

PERDAGANGAN ANTARA INDONESIA DAN SWISS

Varia Perdagangan

INTERNASIONAL

Sebagaimana diketahui, hubungan perdagangan antara Indonesia dan Swiss dilaksanakan berdasarkan pada perdjandjian perdagangan yang ditandatangani di Bern pada tanggal 30 Desember 1954. Oleh karena dari kedua belah pihak tidak dinjatkan maksud untuk mengachirinja, maka perdjandjian tersebut masih berlaku hingga sekarang.

ANGKA-ANGKA STATISTIK.

Menurut angka-angka statistik yang didapat dari pihak Swiss dapatlah dikemukakan sekedar keterangan sebagai berikut :

a. **Djumlah ekspor Indonesia ke Swiss seluruhnja adalah :**

- tahun 1962 meliputi Sw. Fr 13.624.153
- tahun 1963 meliputi Sw. Fr 16.007.959
- tahun 1964 meliputi Sw. Fr 32.246.891.

b. **Impor Indonesia dari Swiss adalah sebagai berikut :**

- tahun 1963 meliputi Sw. Fr 26.720.000
- tahun 1964 meliputi Sw. Fr 9.312.459.

Dengan demikian dalam neratja perdagangan antara Indonesia dan Swiss pada tahun 1963 terdapat kekurangan Sw. Fr 10.712.041 dan pada tahun 1964 terdapat kelebihan sebanjak Sw. Fr 22.934.432.

EKSPOR INDONESIA KE SWISS.

Pada tahun 1963/1964 barang-barang/hasil bumi yang terbesar diekspor ke Swiss dari Indonesia adalah : kopi, tembakau, karet, kaju, vegetables-oil.

Menurut keterangan-keterangan yang didapat, kenaikan impor commodities dari Indonesia ke Swiss naik dalam volume maupun dalam djumlah yang agak menjolok, antara lain disebabkan karena meningkatnja volume ekspor Indonesia yang disalurkan ke pasaran Eropa.

a. **Suppliers kopi selain Indonesia adalah :** Brasilia, Colombia, Costarica, Afrika Barat dan Kongo.

Djenis-djenis kopi yang diimpor di Swiss adalah : Arabica dan Robusta (Java/Sumatra). Pada waktu-waktu yang lalu dari beberapa importir kopi di Swiss dikemukakan bahwa mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan kopi Indonesia menurut djumlah yang mereka butuhkan, sedangkan perhatian pihak consumers di Swiss masih tjukup besar. Untuk tahun 1964 terlihat kemadjuan yang agak menjolok dari djumlah kopi yang di-

impor di Swiss jaitu 5.344.844 kg dibandingkan dengan 2.429.128 kg pada tahun 1963. Meskipun demikian kepada KBRI di Bern masih sadja diadjukan permintaan-permintaan terhadap kopi Indonesia, karena djumlah kopi yang mereka dapat dari pasaran di Italia dan Djerman masih belum mentjukupi.

b. **Kedudukan teh Indonesia di pasaran Swiss terdesak oleh teh dari Srilangka dan India. Mengenai hal ini kiranja patut mendapat perhatian bahwa volume impor teh di Swiss masih sangat ketjil. Pada tahun 1963 hanya 13.558 kg dan tahun 1964 13.994 kg dan merupakan 1% dari djumlah impor teh di Swiss, sedangkan teh Indonesia pernah menduduki tempat yang penting dalam pasaran dunia.**

c. **Menurut keterangan yang didapat maka supply tembakau hampir seluruhnja didapat dari pasaran tembakau di Djerman Barat, dan pada tahun 1964 yang dibeli ialah tembakau dari djenis Besuki.**

d. **Mengenai kopra, supplier untuk Swiss adalah Indonesia dan Philipina. Kemungkinan perluasan pasaran masih besar, djika dapat dipelihara kwalita kopra yang diekspor Indonesia.**

e. **Kaju yang diimpor ke Swiss ialah dari djenis-djenis ebony, teak dan sonokeling. Jang mendapat perhatian besar ialah djenis ebony yang dipergunakan dalam industri meubel. Sebagaimana halnja dengan tempat-tempat lain, permintaan akan ebony djauh lebih besar daripada djumlah yang dapat dilever ke Swiss. Meskipun sudah dipakai djenis-djenis kaju lain seperti : zebrano (dari Gabon dan Kamerun), wenge (Kongo) dan palisander (Madagaskar dan India) sebagai substitutes, namun ebony Indonesia tetap lebih disukai. Supplier ebony lainnja untuk Swiss ialah Nigeria. Dalam hal teak-wood djuga banjak diminta, tetapi harus diakui bahwa mereka lebih menjukai teak-wood dari Burma dan Afrika. Meskipun demikian perluasan perdagangan teak selalu masih dapat diusahakan.**

f. **Disamping itu patut djuga diselidiki pemasaran "by-products" hasil-hasil hutan lainnja. Pada waktu ini nampak bertambahnja perhatian terhadap barang-barang keradjinan Indonesia serta bagaimana persoalan pengimporan barang tersebut langsung ke Swiss. Hal ini djuga hendaknja mendapat perhatian dari Pemerintah. Untuk masa jang akan**

datang diharapkan dapat diusahakan untuk mengadakan penjelidikan-penjelidikan pemasaran barang-barang setjara teratur, jang pada waktu ini belum dapat dilaksanakan dengan baik.

Demikianlah sekedar gambaran mengenai keadaan impor barang-barang/hasil bumi kita di Swiss.

3. IMPOR INDONESIA DARI SWISS.

Impor Indonesia dari Swiss pada tahun 1964 berjumlah Sw. Fr 9.312.459 (seperti terlihat dalam angka-angka statistik Swiss). Barang-barang impor jang terbesar antara lain ialah : bahan-bahan kimia dan obat-obatan, mesin-mesin, barang-barang aluminium, alat-alat fotografi, alat-alat kedokteran, sendjata-sendjata dan amunisi. Pada tahun 1964 telah dibeli tiga buah pesawat "Pilatus Porter", jang dapat naik dan mendarat dilapangan ketjil. Tjara pengiriman pesawat-pesawat tersebut ke Indonesia diterbangkan oleh penerbang-penerbang kita jang khusus dikirim ke Swiss, dengan didampingi oleh beberapa penerbang dari Pilatus. Pesawat-pesawat tersebut digunakan di Irian Barat untuk keperluan "Search and rescue" dan djuga digunakan oleh P.N. Merpati Nusantara.

4. PERLUASAN PERDAGANGAN EKSPOR BARANG/HASIL BUMI INDONESIA KE SWISS.

a. Persoalan-persoalan.

Sedjak Indonesia memutuskan hubungan perdagangan dengan apa jang disebut "Malaysia" dengan by-passing Singapura, beberapa pengusaha-pengusaha di Swiss mengadakan approach kepada KBRI Bern untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang bagaimana usaha-usaha jang akan didjalankan oleh Pemerintah R.I. dalam lapangan perdagangan luar negeri pada umumnja dan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan/mengusahakan "direct trade" dengan Swiss. Hal ini mendapat perhatian khusus dari Bagian Ekonomi. Menurut keterangan-keterangan jang diperoleh dari para pengusaha di Swiss, sebenarnya perhatian mereka terhadap commodities Indonesia masih tjukup besar, dan djika dilihat dari kebutuhan Swiss terhadap commodities tersebut tjukup memberi harapan bagi kita untuk berusaha memperluas pemasaran dimasa datang.

Persoalan-persoalan jang sebenarnya mendapat perhatian khusus dari pihak kita ialah antara lain, bahwa :

— kwalita barang-barang Indonesia jang diimpor di Swiss sering tidak sesuai dengan kontrak,

- delivery dari barang-barang tersebut sering mengalami kelambatan,
- supply dari Indonesia tidak/belum tetap,
- pihak Swiss mengalami banjak kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan commodities kita dari beberapa negara lain di Eropa,
- belum tjepatnja hubungan telekomunikasi dengan Indonesia.

Hal-hal inilah jang menjebabkan pihak Swiss agak enggan-enggan untuk mengadakan transaksi dengan Indonesia, sedangkan pada umumnja pihak Swiss untuk konsumsi dalam negeri membutuhkan djumlah commodities setjara teratur dengan kwalita jang baik. Oleh karena kesukaran-kesukaran tersebut diatas maka pihak pengusaha-pengusaha di Swiss sering harus meng-"switch" pesanan-pesanan/pembelian-pembeliannja kepada negara-negara lain (misalnja Afrika, India, Srilangka), dengan demikian kita kehilangan kesempatan jang baik.

Kemudian KBRI Bern mentioaba mengusulkan kepada Pemerintah untuk membentuk agency/joint-venture baei pemasaran commodities Indonesia di Swiss, karena dari salah seorang pengusaha disana sudah ada kesediaan bertindak sebagai agency atau partner dengan Indonesia.

Idea pembentukan joint-venture di Swiss di kalangan pengusaha umumnja dapat diterima meskipun mereka lebih menjukai bentuk agency. Di kalangan Pemerintah idea pembentukan joint-venture mendapat sambutan baik, dengan harapan bahwa Swiss akan dapat memperoleh "djatah" commodities setjara tetap dan teratur.

Oleh KBRI di Bern telah diadjudkan ususupaja Pemerintah mempertimbangkan mengadakan "direct trade" kaju (ebony, teak wood dsb.) dan dipertimbangkan permintaan seorang importir di Basel untuk mengadakan kontrak pembelian kaju ebony sebanjak 60 ton setahunnja, dan pembentukan joint venture (atau bentuk kerdjasama lain jang sesuai dengan kebidjaksanaan Pemerintah pada dewasa ini), dengan P.N. PERHUTAN untuk pemasaran kaju di Swiss dan Eropa — Amerika pada umumnja. Dari beberapa pengusaha (suppliers barang-barang jang diimpor oleh Indonesia) dikemukakan djuga idea pembentukan suatu badan usaha (baik berupa agency ataupun joint venture) jang akan membeli commodities kita langsung dari Indonesia untuk meng-supply kebutuhan Industri di Swiss. Jang penting dalam hal ini ialah supaja Swiss dapat memperoleh commodities Indonesia setjara tetap dan teratur serangsung dari Indonesia.

b. Pertimbangan dan saran.

Dari fakta-fakta serta usaha-usaha pendahuluan seperti tersebut diatas dapatlah kiranya ditarik kesimpulan bahwa dari Indonesia masih terbuka kesempatan untuk berusaha memperbesar pemasaran export commodities ke Swiss.

Pertimbangan-pertimbangan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

- 1) Oleh karena Swiss itu adalah suatu negara "netral" maka kiranya bagi pemasaran barang-barang ekspor kita tidak akan/sedikit sekali dipengaruhi oleh kegontjangan-kegontjangan sebagai akibat perkembangan hubungan politik seperti apa yang sudah atau mungkin terjdjadi dengan negara-negara lain dalam hubungan kita;
- 2) Persentase volume perdagangan Indonesia dengan Swiss kiranya masih dapat diperbesar djika diambil perbandingan antara persentase ekspor barang-barang kita dan djumlah impor di Swiss, faktor "taste" terhadap commodities kita masih mendalam, dan makin bertambahnya perhatian pihak Swiss terhadap barang-barang kita, baik untuk commodities utama maupun barang-barang lainnja.
- 3) Adanja kesanggupan dari beberapa pengusaha di Swiss yang bonafide untuk bekerja sama dengan kita dalam pemasaran bahan-bahan ekspor Indonesia.

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas disarankan sbb.:

- 1) Dengan tidak mengurangi pentingnya pasaran-pasaran bahan-bahan ekspor kita diberberapa negara di Eropa, kiranya oleh Pemerintah mulai sekarang djuga lebih banjak mentjurahkan perhatian kepada usaha-usaha perluasan perdagangan Indonesia di Swiss.
- 2) Sehubungan dengan itu kiranya dapat dipertimbangkan penjaluran export commodities dalam djumlah yang lebih banjak ke Swiss, setjara tetap, dengan memperhatikan kwalita dan delivery yang tjepat dan tetap.
- 3) Disamping ekspor bahan-bahan utama, kiranya dapat diusahakan djuga penjaluran bahan-bahan lainnja di Swiss, misalnja "by products" hasil-hasil hutan, **barang-barang keradjinan tangan** (batik, sarong, barang-barang souvenir) yang achir-achir ini sering diminta oleh pihak Swiss, burung-burung dari daerah Irian Barat dll.
Untuk dapat lebih mempopulerkan barang-barang tersebut kiranya djuga dapat dipertimbangkan untuk mengada-

UNIT OF MEASUREMENT

METRIC

Weight

1 Kilogram (kg) = 2.2 lbs.

100 kg = 1 quintal (q) = 1.968 cwt.

10 q = 1 Metric ton (M.T.) = 2,205 lbs.

Linear

1 Metre (m) = 3.28 feet

1,000 m = 1 Kilometre (km) = 621 miles

Surface Measurement

1 Hectare (ha) = 2.471 Acres

100 ha = 1 Square kilometre = .386 sq. mi.

Volume

1 Litre (l) = 122 Imperial gallons

100 l = 1 Hectolitre (hl) = 2.750 Imp. bushels

CHINESE

Weight

1 Shih chin (catty) = .5 kg = 1.102 lbs.

100 Catties = 1 Shih tan (picul) = 110.23 lbs.

20 Piculs = 1 Metris ton.

Surface Measurement

1 Shih mou = .067 ha = .165 acres

15 Shih mou = 1 ha.

KOREAN

Volume

1 Suk = 39.68 Imperial gallons.

PHILIPPINE

Volume

1 Ganta = 3 litres = .66 Imperial gallons.

25 Ganta = 1 cavan = 2.062 Imp. bushels

INDIAN

Weight

1 tola = 0.0117 Kg.

3,200 tolas = 1 maund = 37.32 Kg.

Numerical

1 lakh = 100,000

1 crore = 100 lakh = 10 million

AMERICAN

42 US gallons = 34.97 Imp. gallons = 1 barrel (of oil).

kan/ikutserta dalam pameran-pameran di Swiss, dengan demikian para pengusaha disana dapat langsung berhubungan dengan para pengusaha Indonesia, dan mendapatkan keterangan-keterangan lebih landjut mengenai produk-produk kita.

(Demikianlah antara lain Laporan dari KBRI di Bern — SWISS).

Anda ingin SUKSES dalam Perdagangan ?

Datangilah

P.N. PEMBANGUNAN NIAGA



**Aparat Revolusi dalam
bidang perdagangan :**

**IMPOR
EKSPOR
KONTRAKTOR
PROJEK dan INDUSTRI**

Untuk suksesnja usaha anda, harap berhubungan dengan :

P.N. PEMBANGUNAN NIAGA

Division² :

- 1. IMPOR BAHAN BANGUNAN**
- 2. IMPOR ALAT² BESAR/MESIN²**
- 3. IMPOR MESIN² SANDANG**

Alamat :
Djl. Hajam Wuruk no. 127.
D J A K A R T A

Division² :

- 1. IMPOR SANDANG PANGAN**
- 2. IMPOR BAHAN² CHEMICALIEN/PHARMASI**
- 3. E K S P O R**

Alamat :
Djl. Gajah Mada no. 18.
D J A K A R T A

PELAKSANAAN KEPUTUSAN BANTING STIR DIBIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 011 TAHUN 1965

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
MANDATARIS M.P.R.S./PIMPINAN
TERTINGGI BAPPENAS.

Menimbang :

- 1. bahwa Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dengan Ketetapanja No. VI/MPRS/1965 telah memutuskan untuk Banting Stir guna berdiri diatas kaki sendiri dibidang ekonomi dan pembangunan nasional Semesta Berentjana tahap pertama sesuai dengan perkembangan politik dalam dan luar negeri;
- 2. bahwa terhadap ketetapan tersebut diatas perlu segera diadakan tindakan-tindakan seperlunya dalam waktu jang sesingkat-singkatnja;

Mengingat :

- 1. Amanat Politik Presiden/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi pada pembukaan Sidang Umum MPRS ke III tanggal 11 April 1965 jang berjudud "BERDIKARI";
- 2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. VI/MPRS/1960;
- 3. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 107 tahun 1961;

MENGINSTRUKSIKAN :

Pertama : Kepada Pimpinan Harian Bappenas/Menteri Koordinator Urusan Perentjanaaan Pembangunan Nasional untuk menjusun peraturan-peraturan pelaksanaan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. VI/MPRS/1965 tentang Banting Stir untuk berdiri diatas kaki sendiri dibidang ekonomi dan pembangunan jang meliputi :

- 1. Mentjiptakan iklim ekonomi jang sesuai dengan kebutuhan perjuangann dalam memperkuat ketahanan revolusi menghadapi antjangan dan kepungan nekolim;
- 2. Menjusun satu pola Pembangunan Nasional jang mengintegrasikan dan mensinchronisasikan projek PNSB, Mandataris, Daerah, Kopedasan dan Irian Barat untuk tiga tahun terachir dari rentjana tahapan pertama (1966, 1967, 1968);
- 3. Menjusun satu pola pembiajaan jang sedjauh mungkin didasarkan atas kekuatan sendiri dengan mengerahkan semua modal dan potensi jang progresif untuk tiga tahun terachir



*J.M. Menko Urusan Perentjanaaan Pembangunan Nasional
DR SOEHARTO.*

- dari rentjana tahapan pertama (1966, 1967, 1968);
 - d. Menjusun Organisasi pelaksanaan pembangunan baik dipusat maupun didaerah.
- Kedua :** Kepada para Menteri Koordinator Kompartimen dan Menteri untuk membantu Pimpinan Harian Bappenas dalam Penjusunan baik berupa pendapat/saran-saran tertulis maupun tidak tertulis djika diminta oleh Pimpinan Harian Bappenas/Menteri Koordinator Kompartimen Urusan Perentjanaaan Pembangunan Nasional maupun tidak diminta.
- Ketiga :** Pelaksanaan dari pada Instruksi ini harus dilaporkan kepada Presiden/Mandataris MPRS/Pimpinan Tertinggi Bappenas selambatlambatnja pada tanggal 1 September 1965.

Ditetapkan di Djakarta.

pada tanggal 26 Mei 1965

PRESIDEN/MANDATARIS MPRS/
PIMPINAN TERTINGGI BAPPENAS,

ttd.

SUKARNO.

PERUBAHAN SUSUNAN BAPERDEP PERDAGANGAN

Berhubung dengan perubahan Organisasi dan Susunan Departemen Perdagangan Dalam Negeri dan Urusan Perdagangan Luar Negeri, maka dengan Keputusan Menteri Brig. Djen. A. Jusuf No. 062/MPDN/SK/65 telah ditetapkan Perubahan susunan Anggota-anggota Badan Perentjanaan dan Penelitian Departemen (BAPERDEP) Perdagangan beserta Sekretariatnja sebagai berikut :

Ketua :

Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri.

Ketua Harian.

Sudiro M.A. — Pembantu Utama Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri.

Anggota² :

1. Sdr. Alamsjah S.B.P. — Kepala Direktorat Ekspor,
2. -, Ir. J.J. Pitoy M.A. — Kepala Direktorat Marketing dan Research,
3. -, Drs. Sjaaf Muchtar — Kepala Direktorat Pengadaan dan Penjaluran,
4. -, Kho Tek Biauw — G.P.E.I.S.,
5. -, B.J. Rambitan — D.P.R. — G.R.,
6. -, H.A. Chamid Widjaja — D.P.R. — G.R.,
7. -, F.C. Palaunsuka — D.P.R. — G.R.,
8. -, A. Baraba — D.P.R. — G.R.,
9. -, Komodor Udara Sutojo Hadiputro — D.P.R. — G.R.,
10. -, A. Karim S.H. — Swasta,
11. -, Dr. Hasjim Ning — Swasta,
12. -, Daben — Swasta,
13. -, Bakri — Swasta,
14. -, Drs. Soetanto — Universitas Indonesia.

Dalam keputusan tersebut jang mulai berlaku pada tanggal: 19 Djuni 1965, selandjutnja ditetapkan bahwa kepada Direktorat Marketing dan Research ditugaskan untuk melaksanakan tugas²/pekerjaan Sekretariat Baperdep Perdagangan.

Seperti diketahui, dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 20 Tahun 1964 telah ditetapkan bahwa ditiap Departemen harus diadakan sebuah badan perentjanaan disingkat BAPERDEP (Badan Perentjanaan dan Penelitian Departemen) jang langsung berada dalam bimbingan dan pengawasan Menteri jang bersangkutan. Adapun tugas BAPERDEP adalah sebagai berikut :

- a. menjusun usul rentjana pembangunan tahunan, rentjana pembangunan djangka pandjang, usul rentjana pembangunan tahap kedua, ketiga dan seterusnya terhitung usul penjempurnaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana 1961 — 1969;
- b. mendjalankan usaha-usaha penelitian, penjelidikan untuk keperluan perentjanaan pembangunan, rentjana perperintjiannja, rentjana susunan organisasinja serta rentjana pelaksanaan — dan sistim pengawasannja;
- c. mengadakan hubungan-hubungan teratur dan sistimatis dengan Departemen Research Nasional serta semua lembaga-lembaga research jang berada dalam wewenang Departemen tersebut guna keperluan pengumpulan data ilmiah selanjutnja.

PEMBUBARAN DEWAN PERTIMBANGAN MENTERI PERDAGANGAN

Dalam rangka Reorganisasi Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri kearah penjederhanaan dan efisiensi, maka berdasarkan Keputusan Menteri Brig. Djen. A. Jusuf No. 063/MPDN/SK/65 tertanggal 19 Djuni 1965 Dewan Pertimbangan Menteri Perdagangan, jang dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 64/M/SK/64 tanggal 11 Maret 1964 beserta semua perobahaan²/tambahan²nja, dibubarkan dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa para anggotanja.

PERSAINGAN ANTARA KARET ALAM DAN KARET SINTETIK DALAM 4 LAPANGAN

ROSEDE DJENIS KARET ALAM BERUPA GRANULATED RUBBERS DENGAN SPESIFIKASI TEKNIS SEBAGAI DJAWABAN TERHADAP SAINGAN KARET SINTETIK

Dikalau pada permulaan tahun 1950-an karet sintetik itu dianggap hanya sebagai usaha "filling the gap" belaka terhadap kebutuhan akan bahan karet yang semakin meningkat dan yang tak sanggup dipenuhi seluruhnya oleh karet alam, maka setahun setelah 1960-an gejala ini telah berubah sama sekali. (Karet sintetik harus berdiri menurut negara-negara industri masing-masing karena dua alasan, yakni tendency kearah autarki/oligopoly dan karena keharusan kearah integrasi vertikal dalam industri perminjangan, dsbnja).

Karet sintetik yang umumnja dispesifikasi setjara teknis itu, dapat dibagi atas tiga golongan besar yang merupakan saingan raksasa karet alam, yakni :

Karet Styrene — Butadiene, yang dianggap sebagai general purpose rubber yang mempunjai sifat-sifat fisik lebih dari karet alam dalam hal :

- a. wear resistance;
- b. groove cracking resistance;
- c. aging resistance;
- d. fast curing. Hanya ia kalah dari karet alam dalam hal *resilience* atau *elasticity*-nja, sifat mana yang dibutuhkan sangat dalam pemakaian ban-ban berat (heavy duty tires), demikian djuga heat-build-up yang tidak baik pada sintetik.

Karet-Karet spesial (speciality rubbers) terdiri dari karet *butyl*, *neoprene* dan *nutrile*.

Karet butyl djuga mempunjai elastisitas yang buruk dan lekas panas, tapi sebaliknya sangat rapat udara hingga pemakaiannya khusus hanya untuk ban dalam. Neoprene sangat tahan panas dan api (flame resistance) dan nitile tahan minjak dan gas.

New Stereo, yang terpenting *Polyisoprene* dan *Polybutadie* Polyisoprene hampir menyerupai sifat-sifat karet alam hingga dapat dikatakan suatu natural rubber duplicate.

Polybutadiene biasanja dipakai sebagai tjampur dengan karet alam (in blend with) yang dapat memberikan elastisitas yang tinggi dan heat build up yang rendah hingga blending ini sangat baik untuk ban-ban heavy duty.

Dengan djumlah produksi riilnja ditahun 1964 sebesar 2,4 djuta long ton dinegara-negara industri non komunis dan inclusive Rusia c.s. 3,0 dinto ton sedangkan kapasitas produksinja \pm 4,1 djuta long ton) dibandingkan dengan produksi karet alam 2,1 djuta ton, maka karet sintetik tidak lagi merupakan minoritas, malah telah meningkat menduduki mayoritas dalam supply perkaretan sedunia.

Permintaan akan bahan karet terus-menerus meningkat dan dalam hal ini perkembangan karet sintetik agaknya lebih tjepat daripada perkemba-

ngan industri kebutuhan karet sedunia, hingga permintaan lebih tjetil daripada kapasitas produksi yang ada.

Sedangkan sebaliknya produksi karet alam sebelum k.l. 100.000 — 200.000 ton lebih kurang dari pada konsumsi, hingga dengan demikian terdjamilah pasaran karet alam yang masih luas.

Dengan adanya fakta ini maka tidaklah usah ada pesimisme untuk hari depan fihak produsen karet alam, asal sadja mau mempersendjatai diri menghadapi saingan-saingan raksasa itu terutama dengan hal-hal yang baru yang dapat dilaksanakan dengan djalan penelitian dan perkembangan (research & development) kearah penjempurnaan sesuai dengan *service* yang dikehendaki *konsumen*.

Dengan demikian maka persaingan antara karet alam dan sintetik itu berkisar dalam 4 lapangan, yakni :

1. Saingan dalam lapangan harga.
2. " " kwalitas.
3. " " kwantitas.
4. " " research & development.

Persaingan harga :

Disebabkan oleh karena kapasitas produksi yang semakin meningkat dari pada karet sintetik yang malah lebih tjepat perkembangannya daripada kebutuhan akan karet sedunia umumnja hingga produksi karet ini setjara riil berada k.l. 30% dibawah kapasitas, maka timbullah antara masing-masing djenis karet sintetik suatu persaingan hebat ditahun-tahun terakhir ini.

Kapasitas produksi yang melebihi kebutuhan ini serta persaingan tersebut menimbulkan suatu gejala penurunan harga karet sintetik dipasaran dunia umumnja.

Sebagai akibat daripada penurunan harga karet sintetik ini, maka menurut laporan dari Natural Rubber Producers' Research Association memberikan efek pula kepada karet alam yang diistilahkanja sebagai suatu "sympathetik downward movement in natural rubber prices".

Pada umumnja dapat dikatakan bahwa masih terdapat suatu kontras yang kuat antara karet sintetik dan karet alam dalam soal trend harga ini, yakni bahwa karet sintetik itu terkenal sangat stabil dalam harganja dibandingkan sangat fluktuatifnja karet alam.

Selama 15 tahun belakangan ini, maka harga rata-rata dari karet alam djenis RSS I di New York berfluktuasi dari minimum 17,56 cents tiap pound hingga maksimal harga yang ditjapainja 59,07 cents. Sedangkan dalam periode yang sama, harga karet sintetik djenis SBR berkisar hanya antara 18½ dan 25 cents, butyl antara 18½ dan 23 cents, neoprene antara 32 dan 41 cents.

Hingga mana harga karet alam ini dapat menu-

run sedjauh dalam rangka masih menguntungkan maka laporan UNCTAD menegaskan pendapatnja sbb. : "..... it now seems to be accepted in the natural rubber industry that it would be prudent to aim to produce profitably for a selling price of 18 U.S. cents per pound f.o.b. Singapore, which is 4 cents below the lowest average price received in any year since 1950".

Memang dalam hal ini harga pokok karet alam rata-rata berada disekitar 15 cents dan harga ini kiranja dapat ditekan lagi, terutama dengan djalan mengusahakan kenaikan produksi tiap hektarnja, dengan terutama menggunakan high yielding clones.

Menurut perhitungan harga pokok Malaya, maka suatu kebun jang dapat menghasilkan 1.500 ton setahunnja dengan highyielding menghasilkan 1.500 pounds tiap acre akan berdjumlah tidak lebih dari 12 cents tiap pound (tidak termasuk cessesduty dan taxes lainnja).

Persaingan kualitas serta research & development:

Harapan karet sintetik, bahwa mereka dengan djenis-djenis barunja, termasuk djenis "stereo" dapat mendesak karet alam disegala lapangan ternjata tidak berhasil hingga tahun 1964, terutama tidak dapat sama sekali dilapangan heavy duty tires.

Namun demikian maka terasa sangat kebutuhan akan memperkuat daja-tahan karet alam dengan antara lain memperbaiki tjara-tjara visual inspection dan visual grading ala Green Book. Tjara-tjara pembatasan dan ruwetnja/banjaknja visual grading jang berlaku dalam perdagangan bagi karet alam, diakui menghambat atau mempersulit service bagi kaum konsumen (rubber-manufacturing industry).

Industri pengerdjaan karet sebagai pemakai menginginkan suatu sjarat-sjarat jang dapat memberikan gambaran mengenai sifat-siat teknis dan sifat-sifat physic daripada karet itu, yakni dengan djalan memberikan "technical spesification" untuk karet alam oleh fihak produsennja, sebagaimana halnja dengan karet sintetik.

Dalam tahun-tahun belakangan ini beberapa kaum produsen karet alam organisasi-organisasi research dan organisasi-organisasi standardisasi dilapangan karet alam dipelbagai negara telah mengembangkan tjara-tjara spesifikasi teknis untuk djenis-djenis karet alam jang telah ada dan djenis-djenis karet baru (misalnja granulated rubber, comminuted/crumb rubber).

Maksud tudjuan daripada usaha tersebut ialah menetapkan djumlah jang terbatas sekali banjaknja mengenai mutu karet jang dispesifikasikan setjara teknis itu, jang mentjukupi segala djenis karet dan dalam bentuk apa sadja ia dihasilkan.

Sjarat-sjarat dalam melaksanakan spesifikasi setjara teknis ini harus memenuhi tiga sjarat, yakni :

1. ia harus dapat memenuhi sjarat-sjarat/keinginan/service terhadap industri pengerdjaan karet;

2. ia harus praktis dapat dibuat dengan mudah oleh siprodusen;
3. ia harus mudah dan tjepat dikontrol oleh sikonsumen.

Menurut usul perintjian I.R.S.G. maka dalam angket jang diadakan ternjata 6 matjam spesifikasi jang telah diterima oleh semua fihak untuk dipraktekkan dalam T.S. ini, jaitu :

1. Soal dirt content, karena diketahui bahwa ketahanan terhadap "flex cracking" bergantung sangat pada djumlah kadar kotor itu.
2. Ash content, banjaknja kadar abu itu memberikan indikasi terhadap adanja bahan-bahan mineral.
3. Copper content, adanja kadar tembaga itu mempertjepat kepekaan karet akan oksidasi.
4. Manganese content, adanja kadar mangan ini memperlemah ketahanan karet terhadap oksidasi.
5. Nitrogen content, memberikan indikasi terhadap adanja latexskim atau karet skim.
6. Volatile matter content, memberikan indikasi bahwa karet tersebut kering dengan sempurna.

Dalam hal menentukan mutu berhubungan dengan technik spesifikation itu, maka diambil patokan hanya tiga buah mutu, jang perintjian sjaratnja adalah sbb. :

Spesifikasi	1st grade	2nd grade	3rd grade
Dirt content (% less than) *	0,05	0,2	0,5
Ash content (% less than)	0,5	1,0	1,5
Copper content (part p. million less than)	8	8	8
Managenese content (part per million less than)	10	10	20
Nitrogen content (% less than)	0,7	0,7	0,7
Volatile matter content (% less than)	1,0	1,0	1,0

*) -44 — 45 micron aperture (ASTM 325 screen).

Dalam hal ini ditjatat pula bahwa warna (jang chas merupakan aspek visual inspection) tidaklah tergolong dalam spesifikasi, karena antara warna dan sifat-sifat teknis tidak ada hubungannja, ketjuali dalam membuat barang jang baru diperhitungkan warna/ketjerahannja.

Pada umumnja apa jang disarankan oleh I.R.S.G. itu hanya meliputi penilaian kimiawi (chemical test) sedjadjar dengan sjarat-sjarat tertjakup dalam Green Book, sedangkan belum tampak usaha melengkapi spesifikasi teknis ini hingga pada physical test. Banjak organisasi-organisasi konsumen dipelbagai negara mengusulkan ditambahkannya physical test ini, antara lain jang diusulkan itu spesifikasi-spesifikasi teknis dalam hal :

- Mooney viscosity.
- Cure rate/volcanizability specifications.
- Aceton extract.

- Plasticity retention.
- Resistance to oxidative degradation/ageing resistance.
- Tensile strenght.
- Dynamic resistance.
- Temperature resistance.

dapatlah diambil kesimpulan bahwa pada prinsipnya sipemakai/pabrikan karet itu tambah lama tambah minta service yang lebih memberatkan, sebagai eksekutif daripada saingan yang hebat antara karet alam dan sintetik itu.

Prosedur karet alam perdagangan yang baru :

Bermatjam-matjam djenis karet perdagangan telah diproduksi dan diperdagangkan oleh beberapa negara produsen karet alam dalam usaha memperbesar daya saing, seperti Super Processing Crepe (S.P. Rubber), Hevea Plus, dsbnja.

Disamping itu sebagai service terhadap konsumen, maka produsen karet alam juga telah menyetuskan T.C. Rubbers (Technical Classified Rubber). Namun demikian, belumlah dapat dikatakan bahwa konsumen puas dengan service ini, ia meminta lebih banyak lagi berhubungan dengan saingan karet sintetik. Maka lahirlah ditahun-tahun belakangan ini akibat hasil-hasil penelitian beberapa jenis processing baru, yang antara lain sbb :

1. Decan Process, yang menghasilkan djenis karet lembaran seperti sheets.
2. Grana Process, menghasilkan karet berbutir-butir yang kemudian dikempa menjadi blok-blok (block rubber/comminuted rubber).
3. Screw atau Extruder Process, yang menghasilkan juga karet berbentuk butir-butir dan di block.

Yang mendapat perhatian kita khusus adalah sebenarnya yang tsb. dalam ad 2 dan 3, yang menghasilkan karet baru dengan memungkinkan spesifikasi setjara teknis. Screw process sebenarnya lebih bermanfaat bagi Indonesia karena peralatan tersebut memungkinkan membersihkan bahan mentah karet kotor (termasuk slab-slab rakjat) hingga hasil akhirnya bisa menjadi high grade. Screw process ini peralatannya terdiri dari 4 bagian pokok, yang dapat digambarkan sbb. :

bagian pertama terdiri dari mesin-mesin pemotong (shredder) dimana karet yang berupa koagulum/bekuan dipotong-potong menjadi ketjil-ketjil. Potongan-potongan ini lalu dimasukkan kedalam bak pentjutji (washing tank) hingga terlepas dari pasir, tanah, kotoran-kotoran lainnya.

bagian kedua mengadakan pemasaran (dewatering) terhadap potongan-potongan karet yang basah itu yang dilakukan dengan screw press. Hasil yang keluar dari screw press ini masih mengandung air k.l. 15%

bagian ketiga adalah process pengeringan dengan menggunakan panas yang dihasilkan oleh tekanan tinggi. Kadar lembabnya menurun hingga 0,5%.

bagian keempat adalah process pendinginan

(cooling) dan terdiri dari pelat baja yang berlubang-lubang yang bergerak seperti ajakan yang menerima potongan-potongan karet dari bagian pendingin. Potongan-potongan karet (butir besar) itu karena panas menjadi lengket satu sama lainnya hingga merupakan suatu lembaran. Kemudian didinginkan dengan angin (air dried) yang ditiupkan oleh sebuah kipas melalui lubang-lubang dipelat tersebut.

Kemudian karet berupa lembaran tadi dipotong-potong seperti butiran dan dikempa merupakan suatu block (bandela) yang berat k.l. 70 lbs. Process ini memakan waktu hanya 12menit dan kapasitas produksinya adalah k.l. 2.000 lbs. tiap djamnya.

Mengenai "Grana Process" ditjatat bahwa proses ini juga telah dihasilkan di Malaya, Vietnam, Ivory Coast Afrika Barat, dan menurut pengusahaan dinamakan process "Promoci" (Perantjis), process "Dynat" (Guthrie Estates Agency Ltd.).

Dalam hal "Grana" ini bahan bakunya adalah bahan karet bersih, baik berupa bekuan maupun berupa latex kebun. Setjara pengolahan ekonomis, maka bekuan atau cup koagulum dan cup lump lebih diutamakan daripada latex. Kapasitas produksi k.l. hingga 700 ton sebulan.

Cup lump yang bersih itu dapat pada hari itu juga dikerdjakan atau disimpan dahulu beberapa hari dalam tanki yang separohnja berisi air. Lump yang disimpan itu harus dilindungi terhadap sinar matahari langsung dan djangan lebih lama daripada seminggu. Perendaman dalam tanki ini adalah pekerjaan pertama-tama, yakni mentjutji dan menghilangkan kotoran pada lump yang melekat.

Melalui tanki pembasuh ini lump tersebut diangkut ke alat pemotong yang berputar terus (rotary cutter) yang mempunyai suatu saringan berlubang-lubang berdiameter 1 intji. Potongan-potongan/ukuran ini kemudian dikeringkan dalam alat pengering (dryer) lalu dimasukkan dalam alat pembutir (pelletising machine) yang menghasilkan butiran berukuran k.l. 3/16 intji diameter. Butiran-butiran karet ini lalu ditjutji lagi hingga bersih dan dikeringkan dalam peti-peti pengering yang memuat 150 lbs. karet (drying trays) dengan djalan hawa panas dalam suhu demikian rupa hingga dihindarkan timbulnja oksidasi.

Lamanja pengeringan ini adalah 12 — 14 djam, dan rata-rata tiap djam dapat menghasilkan butiran-butiran kering sebanyak 75 lbs. tiap-tiap peti pengering dengan suhu 65°C pada bagian atas dan 90°C dibagian bawah. Akhirnya butiran-butiran yang ditimbang seberat 75 lbs. dan dimasukkan dalam peti kempa berukuran 28 x 14 x 16 intji.

Bandela-bandela djadi yang berukuran 28 x 14 x 16 intji dan beratnja 75 lbs. itu dibungkus dengan plastik (polythene) yang siap untuk diperdagangkan. Process tersebut ini memungkinkan kita mengadakan spesifikasi teknis yang diperlukan oleh si konsumen, hingga dapatlah disimpulkan bahwa *granulated rubbers akan merupakan saingan hebat ataupun djawaban karet alam dalam menghadapi karet sintetik.* (Komando Karet).

P.T. KARKAM

(P.T. KULIT ATJEH RAYA KAPTEN MARKAM)

KANTOR PUSAT : Djl. Pintubesar Selatan 97 atas Djakarta-Kota
Tilpon 23368 - 22644 - 21092
alamat kawat : KARKAM DJAKARTA

KANTOR TJABANG : M E D A N
P e k a n b a r u
D u m a i
R e n g a t
D j a m b i

KANTOR PERWAKILAN : T e m b i l a h a n
B e n g k a l i s
P a l e m b a n g
S i b o l g a

PPN P.T. KARKAM : A e r m o l e k (R i a u)
Perusahaan Remilling P.T. KARKAM: Kampung Lalang Sunggal
(Sumatra Utara)

EXPORTIR : K A R E T
K O P R A
dan hasil perkebunan lainnja

IMPORTIR : BARANG² KEPERLUAN PEMBANGUNAN
KENDARAAN²
MESIN² DIESEL
untuk berbagai matjam keperluan
MESIN² KAPAL

* * *

BANK² KAMI IALAH : BANK INDONESIA
BANK NEGARA INDONESIA
BANK DAGANG NEGARA
BANK KOPERASI TANI & NELAJAN

* * *

** Dalam rangka „banting setir” untuk „berdikari” dibidang ekonomi dan pembangunan,
P.T. KARKAM melaksanakan kegiatan²-nja semata- mata untuk membantu Pemerintah.

** Sembojan kami ”MADJU TERUS PANTANG MUNDUR” UNTUK KEMENANGAN
REVOLUSI dan UNTUK TERTJAPAINJA MASJARAKAT SOSIALIS INDONESIA.

Ekspor ke Sabang dengan Counter Import 30%

Sebagai follow up dari SK Bersama Menteri Urusan Bank Sentral dan Kuasa Menteri Perdagangan dan Negeri No. Kep. 38/UBS/65 tgl. 9-5-1965. aka oleh :

Kepala Direktorat Ekspor dalam Instruksinja No. 2206/Ph/K/65 tanggal 5-6-1965, kepada semua Kepala Seksi Ekspor di Daswati I dan Tjabang² Direktorat Ekspor dipelabuhan-pelabuhan tertentu diseluruh Kepulauan Sumatra jang mulai berlaku tgl. 15-6-1965, telah ditetapkan peraturan² mengenai hasil² bumi/barang² jang diekspor dari pelabuhan² Daswati I Sumatra termasuk kepulauan disekitarnja ke pelabuhan Bebas Sabang.

Pimpinan BLLD dengan pengumumannja No. 1/SB/BLLD/65 tgl. 17-6-1965 telah ditetapkan peraturan² pelaksanaan Ekspor dengan Counter Import 30% antara Sabang dengan kepulauan Sumatra.

Hasil² bumi/barang jang dapat diekspor.

1. a. Semua hasil² bumi jang tidak sanggup disortir dalam wilayah Daswati I jang bersangkutan mendjadi mutu standard jang berlaku dipasaran Internasional dan merupakan surplus sesudah dipenuhi kebutuhan setempat dan/atau daerah lain.
- b. Hasil² bumi jang merupakan surplus sesudah dipenuhi kebutuhan perusahaan² sortasi/rumah asap/remilling dan keperluan konsumsi dalam wilayah Daswati I jang bersangkutan dan/atau daerah² lain.
- c. Hasil² bumi/barang² jang tersebut dalam lampiran Instruksi Kepala DEK No. 1547/Ph/K/65 tanggal 26 April 1965 *) dan No. 1790/Ph/K/65 tanggal 11 Mei 1965.
2. Djenis dan kwanturnya hasil² bumi ekspor jang dimaksud pada pasal 1 ayat a dan b diatas, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Daswati I, setelah mendengar Kepala Tjabang Departemen Perdagangan setempat.
3. Ekspor hasil² bumi/barang² dimaksud pada pasal 1 ayat a, b dan c dilakukan atas dasar L/C dengan hak Counter-impor 30 persen dengan prosedur pelaksanaan jang diatur oleh Biro Lalu Lintas Devisa.
4. Hasil² bumi/barang² ekspor jang bermutu standard tetap dapat diekspor ke pelabuhan bebas Sabang menurut prosedur ekspor biasa keluar negeri, untuk mana berlaku Peraturan S.P.P. biasa dan dengan S.P.P. - tambahan khusus untuk daerah² ex.-konsinjasi.

Lihat Warta Perdagangan No. 2 hlm. 36.

5. Penetapan harga :

Penetapan harga penjerahan hasil² bumi/barang² ekspor dimaksud pada pasal 1 ayat a, b dan c oleh Kepala² Sekdek dan Tjaded dilakukan sesuai dengan ketentuan² dalam Instruksi-instruksi Kepala DEK:

No. 1547/Ph/K/65 tanggal 26 April 1965 (Lihat W.P. No. 2 hal. 36)

No. 1790/Ph/K/65 tanggal 11 Mei 1965, ketjuali untuk hasil² bumi tersebut dibawah ini, jang mana harga penjerahannya ditetapkan menurut formulere sebagai berikut:

a. Bahan Remilling :

$$\frac{\text{Blanket C} + \text{Blanket D}}{2} \times 0,60.$$

b. Unsmoked Sheet :

$$\frac{\text{R.S.S. IV} + \text{R.S.S. V}}{2} \times 0,80.$$

c. Kopi Arabica ex Daswati I Atjeh :

Harga Arabica Sumatra/Sibolga DP $\times 0,85.$

d. Pinang ex Daswati I Atjeh :

1. Pinang bulat = average harga pinang putih/merah $\times 0,75$
2. Pinang belah = average harga pinang putih/merah $\times 0,70$

e. Rottan Segi ex Sumatra :

Average harga Rottan Segi Unwashed kwalitas I, II dan III $\times 0,70$

Kalkulasi harga diatas dihitung berdasarkan harga penjerahan masing² hasil bumi bermutu standard jang ditentukan oleh BLLD setjara periodik dan diteruskan pada Bank² Devisa setempat.

6. Penetapan harga untuk hasil² bumi/barang² ekspor termaksud pada pasal 4 dilakukan menurut Surat Edaran Harga² oleh BLLD.
7. Adapun Lada, Kopra, Cassia-vera, Bidji dan Bunga Pala dan tembakau-lembaran, baik dalam keadaan gesoorteed maupun ongesorteed, karena adanya policy pemasaran tersendiri tidak diizinkan diekspor ke Sabang.
8. Penutupan kontrak-ekspor dari hasil² bumi/barang² termaksud dalam instruksi ini hanja dapat dilakukan pada DEKT setempat, dengan mempergunakan formulir E-I.

II. Pelaksanaan Ekspor dengan Counter Import 30% antara Sabang dengan Sumatra dan kepulauan sekitarnja.

1. Ekspor.

- a. Pelaksanaan ekspor ke Sabang dilakukan menurut peraturan² dan prosedur yang berlaku dalam bidang ekspor.
- b. 70% dari hasil ekspor (jumlah harga penjerahan) harus diserahkan kepada Dana Devisa. 30% dari hasil ekspor dibukukan di Sabang pada Bank Indonesia dalam rekening valuta asing „Counterimport” atas nama eksportir yang bersangkutan.

L.C. harus dibuka untuk 100% dan kontrak valuta ditutup untuk 100% dipetjah dalam dua kontrak valuta masing² sebesar 70% dan 30% dari jumlah harga penjerahan.

- c. Dari tiap pembukaan L.C. di Sabang dalam rangka peraturan ini satu tembusan L.C. dikirimkan kepada Tjabang Bank Indonesia Sabang.
- d. Bank Devisa, penjalur ekspor, akan menerima dari Bank Indonesia Sabang suatu nota penegasan mengenai pengkreditan dari rekening valuta asing „Counterimport” (disebut Nota Valuta Counterimport atau disingkat N.V.C.) yang tembusannya diperuntukkan bagi eksportir dan tjabang BLLD setempat.

Pengiriman N.V.C. akan didahului oleh kawat dari Bank Indonesia Sabang kepada Bank penjalur, kawat mana akan menjebut a.1.

- nomor L.C. ekspor semula ;
- nama eksportir ;
- nomor N.V.C. ;
- tanggal N.V.C. (tgl. pengkreditan) ;
- jumlah N.V.C. dalam valuta asing (setelah dipotong 1/4% untuk ongkos² administrasi Bank Indonesia Sabang).

2. Nota valuta counterimport.

- a. N.V.C. merupakan suatu hak bagi eksportir untuk melaksanakan impor atas beban rekening valuta asing „Counterimport”, hak mana berlaku selama dua bulan terhitung dari tanggal N.V.C. sampai tanggal yang sama dua bulan kemudian, dalam jangka waktu mana eksportir dapat mengadakan Pernyataan Impor pada Bank Devisa, penjalur ekspor semula.
- b. Dalam hal N.V.C. untuk seluruhnya atau sebahagian tidak dipergunakan, maka Bank Devisa diharuskan meminta Bank Indonesia Sabang untuk menjetor valutanja kepada Dana Devisa dan memperhitungkan nilai lawan dengan eksportir dengan kurs Transaksi Bank-beli (K.T.B.b).
- c. Sewaktu mengadakan Pernyataan Impor oleh eksportir c.q. pembukaan L.C. oleh Bank Devisa. N.V.C. hanya dapat dipergunakan untuk kurang lebih 90% dari jumlah valutanja. Jang 10% ditjadangkan untuk penyelesaian perhitungannya yang kurang tepat sewaktu melaksanakan counterimport, khusus dalam bidang biaya pengangkutan.

3. Counterimport.

- a. Barang² counterimport dapat dimasukkan dari Sabang atau langsung dari Luar Negeri.
- b. Pada set Pernyataan Impor (P.I.) yang, oleh eksportir setelah diisi lengkap dan diatas P.I. dibubuhi tjam „Counterimport”, diajukan kepada Bank, harus ditambahkan 2 (dua) lembar ekstra untuk Biro Lalu Lintas Devisa. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada sebelah bawah dari P.I. baris c harus diganti/ dibatja sebagai berikut :

„ia memberi kuasa kepada bank dimaksud pada baris 23 c.q. Bank Indonesia di Sabang untuk mendebet rekening „Counterimport”-nja untuk sedjumlah valuta dimaksud pada baris 15 diatas ditambah dengan biaya² lain seperti biaya tambahan pengangkutan, biaya koresponden diluar Negeri dsb. dan ia mengikat diri pada waktu penjerahan pernyataan ini kepada bank membayar biaya² seperti diperintji pada baris 19, 20 dan 21”

- c. Setelah eksportir melunasi biaya² dan sumbangan² wadji maka Bank membubuhi Nomor Registrasi, tanggal, tandatangan dan tjam Bank pada P.I. tersebut, dan Bank mengirimkan lembar ke-1, ke-2, ke-7 dan ke-8 kepada BLLD (Impor) setempat dengan Surat Pengantar rangkap 5 (lima) menurut tjontoh terlampir pada Pengumuman kami No. 9/ Imp/BLLD/65 tgl. 13-5-1965 guna memperoleh pengesahan tentang djenis dan golongan barang yang tertjantum pada P.I. tsb.
- d. Pengesahan P.I.-P.I. tersebut oleh BLLD akan ditjantumkan pada lembar ke-1 dan ke-2, yang oleh BLLD akan dikirimkan kepada Bank dengan surat pengantar „P.I.” yang disahkan.
- e. Baru setelah Bank menerima kembali P.I. lembar ke-1 dan ke-2 itu dapat impornja direalisasikan.
- f. Apabila BLLD tidak dapat mengesahkan suatu P.I. karena barang yang tertjantum didalamnya djenis/golongannya tidak sesuai dengan ketentuan dari Direktorat Impor, maka P.I. tersebut ditolak dan dikembalikan kepada Bank dengan Surat Pengantar „P.I. yang Ditolak”.
- g. Jang berkepentingan dapat mengadakan P.I. „Pembaharuan” dalam waktu 7 (tudjuh) hari kerdja, terhitung dari tanggal penerimaan P.I. „Ditolak” oleh Bank, kepada Bank. Pada P.I.-Pembaharuan dilampirkan P.I. ditolak bersangkutan.
- h. Bank meneruskan P.I. „Pembaharuan” ini menurut prosedur termaksud pada ayat 3 diatas. Perlu dalam hal ini diperhatikan bahwa keputusan B.L.L.D. terhadap P.I. „Pembaharuan” adalah keputusan mutakhir (final) yang berarti, bahwa apabila barang yang tertjantum pada P.I. tersebut tidak sesuai dengan barang menurut keputusan Direktorat Impor maka hak counterimport tidak lagi dapat dipergunakan.

ASURANSI

PENGUMUMAN BIRO LALU LINTAS DEvisa No : 8 Inv/BLLD/65, tgl. 14-6-1965

Dengan menundjuk pada surat Keputusan Preidium Kabinet R.I. tanggal 14 Desember 1964 o. Aa/D/199/64 chusunja diktum ke 2 jaitu jang tenjangkut penutupan asuransi dalam valuta asing, maka bersama ini diberitahukan hal-hal seagai berikut :

Jang dimaksud dengan Perusahaan Negara Asuransi adalah P.N. Djasa Negara. Setiap permintaan asuransi dalam valuta asing harus disalurkan melalui P.N. Djasa Negara.

Pembayaran premi asuransi impor alat-alat untuk objek-objek vital, projek-projek jang dibangun berdasarkan kredit luar negeri dan sebagainja harus diusahakan oleh jang berkepentingan supaya termasuk dalam kredit jang diterimanja dari luar negeri.

Apabila komponen asuransi jang dimaksud tidak dapat dimasukkan dalam kredit jang diterima dari luar negeri, maka jang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Biro agar diperbolehkan membajarnja setjara tunai.

Biro akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan memperhatikan kemungkinan premi jang bersangkutan dibajar dengan Devisa Pelengkap atau atas beban Dana Devisa.

Mengenai penutupan asuransi dalam valuta asing atas barang-barang ekspor baik jang dijual setjara tunai maupun setjara konsinjas-

si oleh Perusahaan-perusahaan Negara untuk pembayaran preminja tidak disediakan devsia atas beban Dana Devisa. Untuk ekspor setjara tunai, premi jang bersangkutan dapat dibajar tanpa izin B.L.L.D. dengan kelebihan valuta asing jang diperoleh Perusahaan-perusahaan Negara sebagai eksportir dalam pelaksanaan ekspornja atas djumlah jang harus diserahkan kepada Dana Devisa berdasarkan harga penjerahan, sedangkan pembayaran premi untuk konsinjasi dapat dilakukan menurut ketentuan jang berlaku dibidang konsinjasi.

4. Untuk penutupan asuransi dalam valuta asing atas kapal-kapal laut/udara jang beroperasi ke-luar negeri, pembayaran preminja harus dilakukan atas beban valuta asing jang berasal dari hasil muatan jang berkepentingan. Untuk pembayaran atas beban valuta asing termasuk harus dimintakan izin Biro terlebih dahulu.

PIMPINAN

BIRO LALU LINTAS DEvisa
DIREKTORIUM,

ttd.

ttd.

R.A. Kartadjumena. Martojo Koento.

- i. L.C. jang oleh bank devisa dibuka berdasarkan ketentuan pada ayat 5 diatas tembusan-nja dikirim kepada Bank Indonesia Sabang dan BLLD, Divisi Pengawasan di Djakarta.
- j. Pemasukan barang dipelabuhan asal dilaksanakan menurut peraturan jang berlaku, jaitu a.l. pengisian K.P.P. Chusus.
- k. Hanja Bank Devisa jang menjalurkan ekspor semula dapat melaksanakan counter impor jang bersangkutan. Bank Devisa diwadajibkan mengadakan tata usaha jang chusus per eksportir mengenai perkembangan dari ekspor, N.V.C., P.I., L.C., K.P.P. Chusus dsb. dalam rangka peraturan dimaksud.

Pengangkutan :

- a. Antara Sabang dengan pelabuhan² Daswati I Kepulauan Sumatra setjara chusus dan atas tanggung djawab sepenuhnya dari eksportir

jbs. dapat diizinkan pengangkutan barang² dengan mempergunakan kapal² lajar/kapal² motor ketjil, alat² pengangkutan mana biasanja tidak mengeluarkan konosemen.

- b. Alat² pengangkutan tersebut diatas harus memperoleh izin dari instansi setempat dari Departemen Perhubungan Laut dan Tjabang Biro Lalu Lintas Devisa jang terdekat, izin mana baru dapat diberikan setelah oleh pemilik sjarat² tertentu dalam bidang pengamanan barang² dapat diberikan.
- c. Dokumen² jang bersangkutan dengan barang² jang hendak dikapalkan dengan alat² pengangkutan tersebut diatas, djika dikehendaki oleh Bank Devisa bersangkutan, dapat diikut sertakan dengan barang² jang dikapalkan.
- d. Perhitungan² dengan eksportir dalam hal demikian baru dapat dilaksanakan oleh Bank Devisa setelah menerima penegasan dari Bank Devisa Sabang.

"Organisasi dan Administrasi" *)

(2)

1. PENGERTIAN ORGANISASI/ ADMINISTRASI.

Jang dimaksudkan "Administrasi" disini ialah administrasi dalam arti jang luas. Administrasi dalam arti jang luas ini dapat kita tindjau dari 3 sudut pandangan, ialah :

- a). Administrasi sebagai proses/kegiatan dalam masyarakat;
- b). Administrasi dalam arti fungsional, dan
- c). Administrasi dalam arti institusional.
- ad. a). Administrasi sebagai proses berarti : keseluruhan proses jang berupa kegiatan², pemikiran², pengaturan², sedjak dari penentuan tujuan kepada penjelenggaraannya sehingga akhirnya tertjapai tujuan tersebut. Dalam pengertian administrasi sebagai proses, terkandung pengertian² sebagai berikut :
 - I. kegiatan² berentjana dari orang²/kelompok orang² jang bekerdja sama untuk mentjapai tujuan bersama;
 - II. penjusunan dan penggunaan tenaga manusia dan benda² setjara sistimatis untuk mentjapai tujuan tersebut dengan biaya jang berupa uang, tenaga dan waktu jang seminimal²nja;
 - III. penetapan kebidjaksanaan, susunan organisasi dan pemakaian alat² jang terdiri dari manusia, benda² dan uang.
- ad. b). Administrasi dalam arti fungsional berarti : segala kegiatan²/tindakan² jang setjara sadar dilakukan kearah tertjapainya tujuan, djadi termasuk djuga penentuan tujuan itu sendiri.
Kegiatan² dan tindakan² itu adalah bersifat; melihat kedepan (forecasting), merentjanaikan dan memperkirakan, mengambil keputusan-keputusan, mengatur orang², alat², waktu, pekerjaan dsb. Kemudian menindakan keputusan² atau ketentuan² itu, mengenai djalannya pelaksanaan, membimbing pelaksanaan dari ketentuan² itu, mengatasi kesulitan-kesulitan jang mungkin timbul dalam pelaksanaan, dsb.
Djadi dalam pengertian fungsional, administrasi menunjukkan fungsi² jang dilakukan oleh orang² jang mendjalankan kegiatan²/tindakan² untuk mentjapai suatu tujuan.
- ad. c). Administrasi dalam arti institusional adalah keseluruhan orang², baik setjara perseorangan maupun setjara kelompok, jang setjara ke-

satunya mendjalankan proses/kegiatan² untuk mentjapai tujuan bersama. Dalam hal ini administrasi mempunyai arti sebagai "institution" atau "aparatur", ialah orang²/kelompok orang² jang mendjalankan kegiatan-tersebut.

Dari uraian diatas tentang pengertian "administrasi" jang luas, sudah tersimpul pengertian organisasi dan management. Djadi organisasi dan management itu adalah dua unsur pokok dalam administrasi dalam arti jang luas. Management itu adalah inti dari pada administrasi, dan organisasi (dalam arti statis) adalah wadah dalam mana management berlangsung. Organisasi dalam arti dinamis (organizing) adalah salah satu fungsi pokok dari pada management, dan berarti : menjusun struktur formal dari pada wewenang (authority) guna mengatur, menentukan, meruniuskan dan mengkoordinir pembagian pekerjaan untuk mentjapai tujuan jang telah ditentukan.

2. ARTI PENTINGNJA ORGANISASI/ ADMINISTRASI.

Pada hakekatnja administrasi, organisasi dan management, adalah inti dan sendi dari pada segala pelaksanaan kegiatan dari suatu negara. Baik buruknja, lantjar tidaknja, boros hematnja bekerdja suatu badan, baik badan itu badan pemerintahan maupun badan swasta, semua itu tergantung dari pada administrasinja, organisasinja dan managementnja.

Suksesnja pekerjaan pemerintah dalam segala bidang banjak tergantung dari pada administrasi organisasi dan management jang baik.

Presiden/Pemimpin Besar Revolusi BUNGO KARNANO, dengan tegas-tegas djuga telah mengemukakan dalam pidato² beliau mengenai arti pentingnja administrasi bagi setiap pembangunan disegala bidang usaha.

Dalam pidato MANIPOL tanggal 17 Agustus 1959, Presiden/Pemimpin Besar Revolusi mengatakan dengan tegas "Sekalipun MANIPOL begitu penting oleh karena telah mendjawab pokok² persoalan Revolusi dan telah menegaskan dasar² untuk menyelesaikan revolusi Indonesia, pelaksanaannya sangat tergantung kepada mereka jang ditugaskan untuk itu".

Disini Presiden menekankan kepada aspek pelaksanaan jang djelas memerlukan: perentjanaikan pengaturan, pimpinan, pengawasan dsb. jang baik artinja: administrasi, organisasi dan management jang baik dalam pelaksanaan MANIPOL itu.

*) "Term-Paper" hasil Karya Kolektip peserta Kursus Perentjanaikan Pembangunan jang diselenggarakan oleh BAPPENAS dari tgl. 1-11-1964 sampai 29-12-1964 di Tjipajung.

Dalam pidato lainnja jaitu diwaktu beliau mengikrarkan DEKON, Presiden/Pemimpin Besar Revolusi djuga mengemukakan tentang pentingnja "technical" dan "managerial skills" untuk melaksanakan DEKON itu.

Dalam AMANAT PEMBANGUNAN beliau kepada DEPERNAS pada tanggal 28 Agustus 1959, Presiden/Pemimpin Besar Revolusi kita djuga telah mengatakan bahwa: „Dalam pembangunan raksasa, organisasi dan administrasi djuga menentukan hasil daknja pelaksanaan sesuatu rentjana. Sekalipun sesuatu rentjana telah dirumuskan dengan sempurna, tapi dengan organisasi dan administrasi jang tidak tepat teratur, rentjana demikian mungkin akan tetap berupa impian sadja”.

Dari utjapan Presiden/Pemimpin Besar Revolusi itu djelaslah kepada kita bahwa organisasi dan administrasi jang baik adalah conditio sine qua non bagi suksesnja suatu pelaksanaan perentjanaan pembangunan.

FUNGSI ORGANISASI/ADMINISTRASI DALAM PLANNING.

Sungguhja organisasi dan administrasi adalah merupakan alat jang sangat penting untuk mentjapai suatu tudjuan usaha, dan perentjanaan ekonomi bertudjuan membangun ekonomi dari pada negara kita. Pembangunan berarti mentjiptakan keadaan ekonomi jang dapat mempertinggi taraf penghidupan rakyat, mempertinggi tingkat pendapatan per capita dalam arti jang nyata, mempertinggi produktivitas faktor² produksi, melenjapkan kemiskinan dan kekelaparan dan mentjiptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Merentjanakan pembangunan ekonomi berarti mengorganisir dan memobilisir segenap sumber² alam dan kekajaan lainnja, dan menetapkan jalan² dan tjara² menggunakan sumber² tersebut bagi kemakmuran dan kesedjahteraan jang merata.

Bagaimanakah mentjapai tudjuan jang telah ditentukan itu?

Jalah dengan djalan mewujudkan adanja "machinery" jang baik, ialah organisasi dan administrasi jang sehat.

Luther Gulick dalam bukunya "The Science of Administration", mengemukakan sebuah formula jana mewujudkan administrasi jang tepat dan teratur, ialah apa jang dikenal dengan singkatan "POSDCORB", jang berarti :

..... **Planning** : jaitu dalam garis² besarnya menentukan lebih dahulu apa² jang perlu dikerdjakan dan metode dan tjara² mengerdjakannja guna mentjapai tudjuan usaha suatu enterprise.

O..... Organizing : ialah menjusun struktur formil daripada wewenang (authority) guna mengatur, menentukan, merumuskan dan mengkoordinir pembagian pekerdjaan untuk mentjapai tudjuan jang telah ditentukan.

S..... Staffing : ialah keseluruhan fungsi personal : mempekerdjakan, melatih, staf serta memelihara kondisi² kerdja jang menjenangkan.

D..... Directing : ialah tugas jang bersifat terus-menerus dibidang pengambilan keputusan² dan merumuskan keputusan² itu dalam bentuk peraturan² instruksi² jang bersifat umum dan khusus dan bertindak sebagai pimpinan usaha.

Co..... Coordinating : ialah tugas jang sangat penting dalam menghubungkan-hubungkan pelbagai bagian pekerdjaan mendjadi satu keseluruhan.

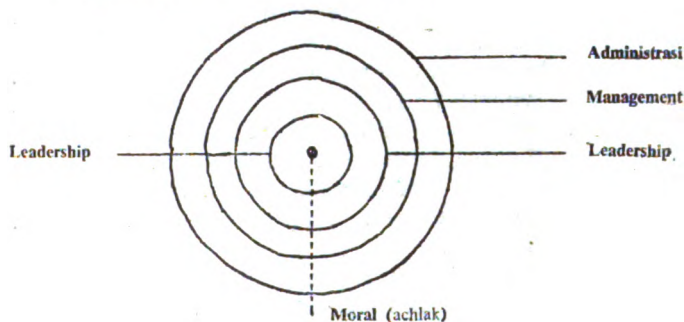
R..... Reporting : ialah membuat laporan (keep informed) kepada atasan tentang segala sesuatu sebagai pertanggungan djawab.

Ini berarti bahwa kepala atau pemimpin harus minta laporan dari bawahannja guna mempertanggung djawabkannja kepada atasannja (though records, research and inspection).

B..... Budgeting : jang meliputi segala sesuatu mengenai financial administration : perentjanaan fiskal, pembukuan, pertanggung djawaban, kontrol dsb.

Demikian isi POSDCORB itu. Seorang administrator harus menguasai fungsi² ini semuanya. Untuk melaksanakan POSDCORB itu dengan se-baik²nja, kita harus mengetahui bagaimana lingkaran administrasi itu.

Ringkasnja kira-kira demikian :



Administrasi baik, kalau Management baik. Management baik, kalau ada Leadership. Leadership tidak akan baik, kalau personalitynja tidak baik, dan personality tidak akan baik, kalau tidak disinari Moral jang baik. Djadi dalam instansi terahir Moral lah jang menentukan.

**SUSUNAN DEWAN LALU LINTAS DEWISA
PERATURAN PEMERINTAH No. 22 TH. 1965**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa dalam rangka pengintegrasian kebidjaksanaan politik perdagangan luar negeri serta pelaksanaannya dengan politik luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 40 tahun 1965 tanggal 10 Pebruari 1965, dipandang perlu untuk merubah susunan Dewan Lalu Lintas Devisa;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara tahun 1964 No. 131);

Mendengar :

Presidium Kabinet Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN SUSUNAN DEWAN LALU LINTAS DEWISA.

Pasal 1.

Pasal 1 dari Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 9) tentang Dewan Lalu Lintas Devisa dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

A. Susunan Dewan Lalu Lintas Devisa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Wakil Perdana Menteri I/Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri sebagai Ketua,
- b. Wakil Perdana Menteri III sebagai Wakil Ketua I,
- c. Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan sebagai Wakil Ketua II merangkap Anggota.
- d. Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia sebagai Anggota.
- e. Menteri Perdagangan sebagai Anggota,
- f. Menteri Urusan Anggaran Negara sebagai Anggota,
- g. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan sebagai Anggota,
- h. Menteri/Sekretaris Umum K.O.T.O.E. sebagai Anggota,
- i. Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri sebagai Anggota.

B. Anggota jang disebut pada sub d dalam ayat A dari pasal ini bertindak djuga sebagai Pelaksana tugas sehari-hari dari Dewan dan sebagai Pimpinan dari Biro.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : D j a k a r t a.

Pada tanggal : 17 Mei 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S U K A R N O.

Diundangkan di Djakarta

pada tanggal 17 Mei 1965

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA,

ttd.

MOCHD. ICHSAN SH.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 No. 37

HARGA PENJERAHAN BARANG² EKSPOR

GOLONGAN I

Berlaku dari tgl. 21 Djuni s/d 26 Djuni 1965.

Pengumuman BLLD : No. 33/HP/65.

RSS. I	US. \$.	sen 20 7/8
RSS. II	US. \$.	sen 20 5/8
RSS. III	US. \$.	sen 19
RSS. IV	US. \$.	sen 17 3/4
RSS. V	US. \$.	sen 14 1/2
THIN PALE CREPE I	US. \$.	sen 20 3/8
THIN PALE CREPE II	US. \$.	sen 19 5/8
THIN PALE CREPE III	US. \$.	sen 18 1/2
BROWN 1 x	US. \$.	sen 15 1/2
BROWN 2 x	US. \$.	seu 14
BROWN 3 x	US. \$.	sen 12 5/8
BLANKET C (No. 3 Thick Blanket Crepe)	US. \$.	sen 11 3/8
BLANKET D (No. 4 Thick Blanket Crepe)	US. \$.	sen 10 1/2
REMILLED 3 (No. 3 Thin Brown Crepe)	US. \$.	sen 11 3/8
REMILLED 4 (No. 4 Thin Brown Crepe)	US. \$.	sen 10 1/2
FLATBARK CREPE	US. \$.	sen 7 1/2
CUTTINGS A	US. \$.	sen 18 1/2
CUTTINGS B	US. \$.	sen 16 1/2
CUTTINGS C	US. \$.	sen 13 7/8
SMOKED BLANKET I	US. \$.	sen 13 1/2
SMOKED BLANKET II	US. \$.	sen 12 1/2

DJAKARTA, 19 DJUNI 1965.

PIMPINAN

BIRO LALU LINTAS DEWISA

DIREKTORIUM

ttd.

R.A. KARTADJOEMENA

Ketua

REFRESHING COURSE
LATIHAN PEMBANGUNAN KETATALAKSANAAN
(L.P.K.) 1965

LEMBAGA MANAGEMENT FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS INDONESIA

akan membuka :

Refreshing Course L.P.K.
Chusus untuk para alumni L.P.K.
Angkatan ke-I s/d V

tempat & waktu :

di Djakarta, dari tgl. 4 s/d 18 September 1965.

Pendaftaran :

dari tgl. 12 Djuli s/d 20 Agustus 1965
pada Administrator L.P.K.
Lembaga Management
Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia
Djalan Salemba 4, Djakarta.

PENETAPAN HARGA PENJERAHAN BARANG² EKSPOR GOLONGAN II

NO. 34/HP/65.

BERLAKU DARI TGL. 21 DJUNI s/d 3 DJULI 1965.

1. COPAL MALENGKET Per Kwintal.

kwaliteit P.W.S.	Nf.	81,—
kwaliteit M.A.P.	Nf.	69,—
kwaliteit W.S.	Nf.	72,—
kwaliteit W.S. (Batjan)	Nf.	59,—
kwaliteit L.A.S.	Nf.	34,—
kwaliteit M.A.	Nf.	23,—
kwaliteit M.B.	Nf.	9,—

2. COPAL LOBA Per Kwintal.

kwaliteit A	Nf.	79,—
kwaliteit B	Nf.	71,—
kwaliteit C. 1.	Nf.	68,—
kwaliteit C. 2.	Nf.	59,—
kwaliteit D	Nf.	55,—
kwaliteit D.B.B.	Nf.	51,—
kwaliteit E	Nf.	48,—
kwaliteit I	Nf.	43,—
kwaliteit Dust	Nf.	12,—

3. KULIT KERBAU Intermediate Per Kwintal.

berat 8 — 10 kg	DM.	200,—
berat 10 — 13 kg	DM.	204,—
berat 13 — 16 kg	DM.	210,—
berat 16 — 20 kg	DM.	218,—
berat 20 — up	DM.	222,—

4. KULIT KERBAU Second Per Kwintal.

berat 8 — 10 kg	DM.	140,—
berat 10 — 13 kg	DM.	142,—
berat 13 — 16 kg	DM.	147,—
berat 16 — 20 kg	DM.	152,—
berat 20 — up	DM.	155,—

5. KULIT KERBAU Pickers Per Kwintal.

berat 8 — 10 kg	DM.	113,—
berat 10 — 13 kg	DM.	117,—
berat 13 — 16 kg	DM.	123,—
berat 16 — 20 kg	DM.	131,—
berat 20 — up	DM.	139,—

6. KULIT KAMBING Ukuran 70 — 100 cm First Per Lembar.

berat average 34 kg (per 100 lembar) Br. pence	54
berat average 37 kg (per 100 lembar) Br. pence	57
berat average 40 kg (per 100 lembar) Br. pence	60
berat average 50 kg (per 100 lembar) Br. pence	70
berat average 60 kg (per 100 lembar) Br. pence	80
berat average 65 kg (per 100 lembar) Br. pence	85
berat average 70 kg (per 100 lembar) Br. pence	90

7. KULIT KAMBING Ukuran 70 — 100 cm Seconds Per Lembar.

berat average 34 kg (per 100 lembar) Br. pence	40½
berat average 37 kg (per 100 lembar) Br. pence	42¾
berat average 40 kg (per 100 lembar) Br. pence	45
berat average 50 kg (per 100 lembar) Br. pence	52½
berat average 60 kg (per 100 lembar) Br. pence	60
berat average 65 kg (per 100 lembar) Br. pence	63¾
berat average 70 kg (per 100 lembar) Br. pence	67½

8. KULIT GIBAS Ukuran 70 — 100 cm First Per Lembar.

berat average 50 kg (per 100 lembar) Br. pence	50
berat average 60 kg (per 100 lembar) Br. pence	60
berat average 70 kg (per 100 lembar) Br. pence	70

9. KULIT GIBAS Ukuran 70 — 100 cm Seconds Per Lembar.

berat average 50 kg (per 100 lembar) Br. pence	37½
berat average 60 kg (per 100 lembar) Br. pence	45
berat average 70 kg (per 100 lembar) Br. pence	52½

10. KOPI ROBUSTA Per Kg.

EK. I	DM.	1.41
EK. II	DM.	1.08
EK. III	DM.	1.04
20/25%	DM.	1.01
AP. I	DM.	1.17
AP. II	DM.	1.03
G.B. 10/12%	DM.	1.04
JAVA W.I.B./I	DM.	1.66

11. KOPI ARABICA Per Kg.

Sumatera/Sibolga D.P.	DM.	2.73
Java W.I.B./I	DM.	3.52
Java W.I.B./SUP.	DM.	3.70
Sulawesi Rantepao D.P.	DM.	3.36
Sulawesi Kalosi D.P.	DM.	3.78
Sulawesi Rantepao Triage	DM.	2.02
Sulawesi Kalosi Triage	DM.	2.27

12. PALA KUPAS Per Kwintal.

Siauw ABCD	DM.	440.—
Siauw Rimpel	DM.	410.—
Siauw BWP	DM.	331.—
Papua ABC	DM.	338.—
Papua BWP	DM.	277.—

13. PALA KUPAS Bukan Banda Bukan Siauw Per Kwintal.

ABCD	DM.	418.—
Rimpel	DM.	390.—
BWP.	DM.	315.—

14. PALA PADANG BIDJO SARING

Per Kwintal US\$. 90.—

15. PALA PADANG Per Kwintal US\$. 47.—

16. BUNGA PALA Per Kwintal.

Siauw I	DM.	550.—
Siauw Gruis I	DM.	528.—
Siauw II	DM.	508.—
Siauw Gruis II	DM.	486.—
Papua I	DM.	395.—
Papua Gruis I	DM.	378.—
Papua II	DM.	360.—
Papua Gruis II	DM.	346.—

17. VANILI Per Kg.

kwaliteit ABC	US\$. 5.79
kwaliteit cuttings	US\$. 4.99
kwaliteit loose-cuts	US\$. 4.99

18. COPRA CAKES/CHIPS Per Kwintal (Kadar Minj. Max. 15%).

copra cakes	DM.	13.—
copra chips	DM.	14.—
ground telquel chips/cakes	DM.	13.—

19. MINJAK ETERIS Per Lb.

minjak sereh minimum 85/35%	Br. pence	30
minjak nilam kwaliteit I	Br. pence	15
minjak nilam kwaliteit II	Br. pence	14
minjak cananga ester 20 up	Br. pence	17
minjak akar wangi	E.£.	1/17/-

Bersambung ke hal. 4

PENETAPAN HARGA PENJERAHAN BARANG² EKSPOR GOL. II.

NO. 34A/HP/65.

Berlaku dari tgl. 21 DJUNI s/d 17 DJULI 1965.

Tudjuan :
Eropa Hongkong

Tudjuan :
Eropa Hongkong

<p>1. Rotan pulut merah W & S per kwintal.</p> <p> kwaliteit I ukuran 3/5 DM. 75,— HK\$. 134,— kwaliteit II ukuran 3/5 DM. 50,— HK\$. 104,— kwaliteit III ukuran 3/5 DM. 23,— HK\$. 40,—</p> <p>2. Rotan pulut merah unwashed per kwintal.</p> <p> kwaliteit I ukuran 3/5 — HK\$. 131,— kwaliteit II ukuran 3/5 — HK\$. 102,— kwaliteit III ukuran 3/5 — HK\$. 39,—</p> <p>3. Rotan pulut putih W & S per kwintal.</p> <p> kwaliteit I ukuran 3/5 DM. 50,— HK\$. 89,— kwaliteit II ukuran 3/5 DM. 18,— HK\$. 37,— kwaliteit III ukuran 3/5 DM. 15,— HK\$. 26,—</p> <p>Rotan pulut putih unwashed per kwintal.</p> <p> kwaliteit I ukuran 3/5 — HK\$. 86,— kwaliteit II ukuran 3/5 — HK\$. 34,— kwaliteit III ukuran 3/5 — HK\$. 25,—</p> <p>Rotan sega W & S per kwintal</p> <p> kwaliteit I ukuran 4/11 DM. 80,— HK\$. 149,— kwaliteit II ukuran 4/11 DM. 60,— HK\$. 104,— kwaliteit III ukuran 4/11 DM. 35,— HK\$. 67,—</p> <p>Rotan sega unwashed per kwintal.</p> <p> kwaliteit I ukuran 4/11 — HK\$. 146,— kwaliteit II ukuran 4/11 — HK\$. 102,— kwaliteit III ukuran 4/11 — HK\$. 64,—</p> <p>Rotan djahab W & S per kwintal.</p> <p> kwaliteit I ukuran 8/11 DM. 60,— HK\$. 209,— kwaliteit II ukuran 8/11 DM. 48,— HK\$. 82,— kwaliteit halfhard ukuran 8/11 DM. 38,— HK\$. 67,— kwaliteit III ukuran 8/11 DM. 30,— HK\$. 60,— kwaliteit IV ukuran 8/11 DM. 20,— HK\$. 44,— kwaliteit IV ukuran 4/8 DM. 27,— HK\$. 54,—</p> <p>Rotan djahab unwashed per kwintal.</p> <p> kwaliteit I ukuran 8/11 — HK\$. 102,— kwaliteit II ukuran 8/11 — HK\$. 79,— kwaliteit halfhard ukuran 8/11 — HK\$. 64,— kwaliteit III ukuran 8/11 — HK\$. 57,— kwaliteit IV ukuran 8/11 — HK\$. 41,— kwaliteit IV ukuran 4/8 — HK\$. 55,—</p> <p>Rotan kooboo/kooboo soft W & S per kwintal</p> <p> kwaliteit II ukuran 8/11 DM. 25,— HK\$. 47,— kwaliteit III ukuran 8/11 DM. 15,— HK\$. 30,— kwaliteit III ukuran 4/8 DM. 23,— HK\$. 41,—</p> <p>Rotan kooboo/kooboo soft unwashed per kwintal.</p> <p> kwaliteit II ukuran 8/11 — HK\$. 44,— kwaliteit III ukuran 8/11 — HK\$. 28,— kwaliteit III ukuran 4/8 — HK\$. 39,—</p> <p>Rotan kooboo/kooboo soft W & S per kwintal.</p> <p> kwaliteit halfhard ukuran 4/8 DM. 35,— HK\$. 72,—</p>	<p>12. Rotan kooboo/kooboo soft unwashed per kwintal.</p> <p> kwaliteit halfhard ukuran 4/8 — HK\$. 51,—</p> <p>13. Rotan tolakan (ex Kalimantan) — HK\$. 22,—</p> <p>14. Rotan tohiti W & S per kwintal.</p> <p> kwaliteit I ukuran 18/24 DM. 60,— HK\$. 104,— kwaliteit II ukuran 18/24 DM. 55,— HK\$. 97,— kwaliteit IIB ukuran 18/24 ... DM. 50,— HK\$. 89,— kwaliteit III ukuran 18/24 DM. 44,— HK\$. 81,— kwaliteit IIIB ukuran 18/24 ... DM. 32,— HK\$. 62,— kwaliteit IV ukuran 18/24 DM. 20,— HK\$. 44,— kwaliteit IV/B ukuran 18/24 ... DM. 18,— HK\$. 34,— kwaliteit V ukuran 18/24 DM. 14,— HK\$. 26,— kwaliteit V ukuran 10/18 DM. 11,— HK\$. 20,—</p> <p>15. Rotan tohiti unwashed per kwintal.</p> <p> kwaliteit I ukuran 18/24 — HK\$. 102,— kwaliteit II ukuran 18/24 — HK\$. 93,— kwaliteit IIB ukuran 18/24 — HK\$. 86,— kwaliteit III ukuran 18/24 — HK\$. 78,— kwaliteit III/B ukuran 18/24 ... — HK\$. 60,— kwaliteit IV ukuran 18/24 — HK\$. 41,— kwaliteit IV/B ukuran 18/24 ... — HK\$. 30,— kwaliteit V ukuran 18/24 — HK\$. 23,—</p> <p>16. Rotan Anduru W & S per kwintal.</p> <p> kwaliteit I ukuran 4/8 DM. 26,— HK\$. 54,— kwaliteit II ukuran 4/8 DM. 20,— HK\$. 41,— kwaliteit III ukuran 4/8 DM. 14,— HK\$. 28,—</p> <p>17. Rotan Anduru Unwashed per kwintal.</p> <p> kwaliteit I ukuran 4/8 — HK\$. 50,— kwaliteit II ukuran 4/8 — HK\$. 39,— kwaliteit III ukuran 4/8 — HK\$. 25,—</p> <p>18. Rotan Lita W & S per kwintal.</p> <p> kwaliteit I ukuran 8/11 DM. 10,— HK\$. 28,— kwaliteit II ukuran 8/11 DM. 8,— HK\$. 18,—</p> <p>19. Rotan Lita Unwashed per kwintal.</p> <p> kwaliteit I ukuran 8/11 — HK\$. 25,— kwaliteit II ukuran 8/11 — HK\$. 15,—</p> <p>20. Rotan Datuk Merah W & S per kwintal.</p> <p> kwaliteit I ukuran 4/8 DM. 50,— HK\$. 89,— kwaliteit II ukuran 4/8 DM. 38,— HK\$. 65,— kwaliteit III ukuran 4/8 DM. 28,— HK\$. 50,— kwaliteit IV ukuran 4/8 DM. 10,— HK\$. 20,—</p> <p>21. Rotan Datuk Merah Unwashed per kwintal.</p> <p> kwaliteit I ukuran 4/8 — HK\$. 86,— kwaliteit II ukuran 4/8 — HK\$. 64,— kwaliteit III ukuran 4/8 — HK\$. 47,— kwaliteit IV ukuran 4/8 — HK\$. 18,—</p> <p>22. Rotan Datuk Putih W & S per kwintal.</p> <p> kwaliteit I ukuran 4/8 DM. 30,— HK\$. 60,— kwaliteit II ukuran 4/8 DM. 23,— HK\$. 44,— kwaliteit III ukuran 4/8 DM. 12,— HK\$. 26,—</p>
--	--

	Tudjuan :	
	Eropa	Hongkong
23. Rotan Datuk Putih Unwashed per kwintal		
kwaliteit I ukuran 4/8	—	HK\$. 57,—
kwaliteit II ukuran 4/8	—	HK\$. 41,—
kwaliteit III ukuran 4/8	—	HK\$. 23,—
24. Rotan Kendari Buton Unwashed per kwintal.		
kwaliteit I ukuran 3/7	—	HK\$. 109,—
kwaliteit II ukuran 3/7	—	HK\$. 86,—
kwaliteit III ukuran 3/7	—	HK\$. 60,—
kwaliteit IV ukuran 3/7	—	HK\$. 29,—
25. Rotan Kendari Buton W & S per kwintal.		
kwaliteit I ukuran 3/7	DM. 65,—	HK\$. 112,—
kwaliteit II ukuran 3/7	DM. 50,—	HK\$. 89,—
kwaliteit III ukuran 3/7	DM. 32,—	HK\$. 62,—
kwaliteit IV ukuran 3/7	DM. 12,—	HK\$. 33,—
26. Rotan Manuk W & S per kwintal.		
kwaliteit I ukuran 10/12	DM. 5,—	HK\$. 13,—
27. Rotan Manuk Unwashed per kwintal	—	HK\$. 10,—
28. Rotan Sabutan W & S per kwintal.		
kwaliteit III ukuran 8/12	DM. 20,—	HK\$. 44,—
kwaliteit IIIB ukuran 8/12 ...	DM. 19,—	HK\$. 43,—
kwaliteit IV ukuran 8/12	DM. 17,—	HK\$. 39,—
kwaliteit IV/B ukuran 8/12 ...	DM. 12,—	HK\$. 30,—
kwaliteit V ukuran 8/12	DM. 10,—	HK\$. 26,—
29. Rotan Sabutan Unwashed per kwintal.		
kwaliteit III ukuran 8/12	—	HK\$. 41,—
kwaliteit III/B ukuran 8/12 ...	—	HK\$. 40,—
kwaliteit IV ukuran 8/12	—	HK\$. 36,—
kwaliteit IV/B ukuran 8/12 ...	—	HK\$. 28,—
kwaliteit V ukuran 8/12	—	HK\$. 23,—

(Sambungan dari hal. 38)

20. KATJANG TANAH KUPAS Per Kwintal.	
m e r a h	DM. 55,—
p u t i h	DM. 64,—
21. KATJANG TANAH BERKULIT Per Metric Ton	US\$. 90,—
22. INDIJK DIPILIH DIPOTONG BASIS STANDARAAD 30/90 cm per metric ton ... E.f. 210/9/6	
23. BIDJI KAPOK Per Metric Ton.	
in bulk	E.f. 12/2/1
in bags	E.f. 14/5/3
24. AMPAS TAPIOCA Per Kwintal (Kadar Pati Max. 73%).	
ampas tapioca	DM. 4,50
tepung ampas tapioca	DM. 5,40
25. GAPLEK Per Kwintal. (Ketjuali Lampung).	
gaplek gelondong	DM. 6,—
tepung gaplek	DM. 5,50
26. TEPUNG TAPIOCA Per Kwintal.	
kwaliteit AAA	E.f. 1/3/-
kwaliteit AA	E.f. 1/2/-
kwaliteit A	E.f. 1/1/-
27. PINANG Per Kwintal (Bukan Pinang Atjeh).	
sliced kwaliteit I	DM. 30,—
kwaliteit II	DM. 24,—
kwaliteit III	DM. 16,—
splitz kwaliteit I	DM. 24,—
kwaliteit II	DM. 17,—
bulat putih	DM. 12,—
bulat merah	DM. 11,—

	Tudjuan :	
	Eropa	Hongkong
30. Rotan Selutup (Serawak) W & S per kwintal.		
kwaliteit I ukuran 14 — up	DM. 55,—	HK\$. 97,—
kwaliteit II ukuran 14 — up	DM. 26,—	HK\$. 54,—
kwaliteit III ukuran 14 — up	DM. 17,—	HK\$. 29,—
31. Rotan Selutup (Serawak) Unwashed per kwintal.		
kwaliteit I ukuran 14 — up	—	HK\$. 93,—
kwaliteit II ukuran 14 — up	—	HK\$. 50,—
kwaliteit III ukuran 14 — up	—	HK\$. 26,—
32. Rotan Umbulu W & S per kwintal.		
kwaliteit I ukuran 10/24	DM. 25,—	HK\$. 44,—
kwaliteit II ukuran 10/24	DM. 15,—	HK\$. 29,—
kwaliteit II/B ukuran 10/24 ...	DM. 12,—	HK\$. 25,—
kwaliteit III ukuran 10/24	—	HK\$. 16,—
33. Rotan Umbulu Unwashed per kwintal.		
kwaliteit I ukuran 10/24	—	HK\$. 41,—
kwaliteit II ukuran 10/24	—	HK\$. 26,—
kwaliteit II/B ukuran 10/24 ...	—	HK\$. 22,—
kwaliteit III ukuran 10/24	—	HK\$. 13,—
34. Rotan Tarumpu W & S per kwintal.		
kwaliteit I ukuran 18/24	DM. 39,—	HK\$. 72,—
kwaliteit II ukuran 18/24	DM. 34,—	HK\$. 65,—
kwaliteit II/B ukuran 18/24 ...	DM. 28,—	HK\$. 57,—
kwaliteit III ukuran 18/24	DM. 21,—	HK\$. 46,—
kwaliteit III/B ukuran 18/24 ...	DM. 11,—	HK\$. 30,—
kwaliteit III ukuran 10/18	DM. 16,—	HK\$. 34,—
35. Rotan Tarumpu Unwashed per kwintal.		
kwaliteit I ukuran 18/24	—	HK\$. 64,—
kwaliteit II ukuran 18/24	—	HK\$. 62,—
kwaliteit II/B ukuran 18/24	—	HK\$. 54,—
kwaliteit III ukuran 18/24	—	HK\$. 43,—
kwaliteit III/B ukuran 18/24 ...	—	HK\$. 28,—
kwaliteit III ukuran 10/24	—	HK\$. 30,—

Djakarta 19 Djuni 1965

28. HEWAN HIDUP Per Ekor.

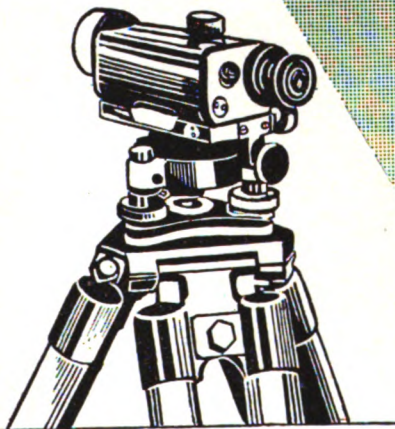
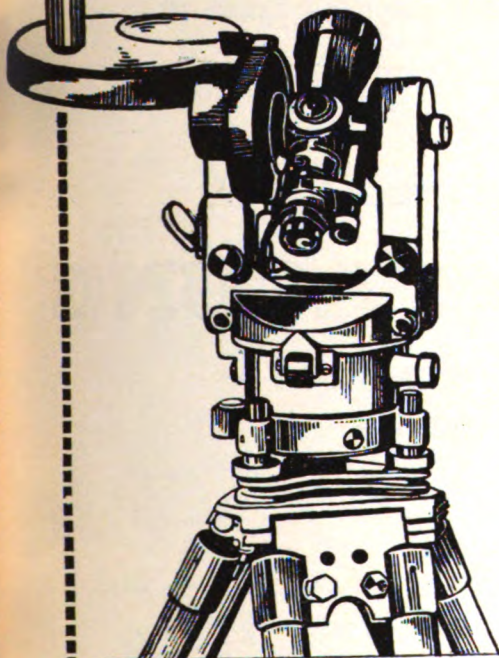
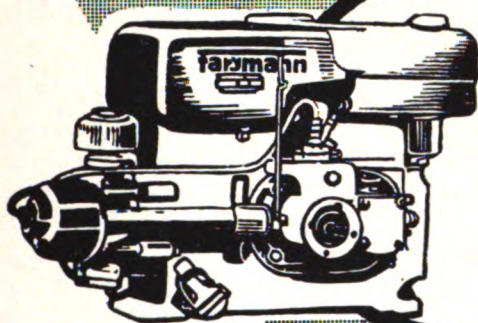
sapi ex Bali	HK\$. 166,—
sapi ex Banda Atjeh	HK\$. 140,—
sapi ex Lombok	HK\$. 159,—
sapi ex Sumba	HK\$. 117,—
sapi ex Timor	HK\$. 105,—
sapi ex Djawa Timur/Surabaja ...	HK\$. 110,—
kerbau ex Bali	HK\$. 140,—
kerbau ex Banda Atjeh	HK\$. 120,—
kerbau ex Sumbawa Besar	HK\$. 152,—
kerbau ex Lombok, Bima, Sumba, Flores	HK\$. 142,—
kerbau ex Djawa Timur/Surabaja	HK\$. 107,—
babi	HK\$. 35,—
29. GAMBIR Per Kwintal.	
gambir kembang No. 1	E.f. 19/17/-
gambir bulat	E.f. 16/17/-
gambir persegi hitam (extrac)	E.f. 7/ 5/-
30. DJAGUNG Per Metric Ton.	
kuning/putih	US\$. 25,—
merah	US\$. 24,—

Djakarta 19 Djuni 1965

PIMPINAN
BIRO LALU LINTAS DEvisa
DIREKTORIUM
ttd.
R.A. KARTADJOEMENA
Ketua

WILD HEERBRUGG

Farymann Diesel



p.n. PANTJA NIAGA

SEKARANG SUDAH DAPAT ANDA MILIKI :

LUKISAN² DAN PATUNG² KOLEKSI

P.J.M. PRESIDEN SUKARNO

Koleksi ini dikumpulkan dalam buku jang disusun oleh satu team ahli, jang memuat 500 Reproduksi Lukisan² dalam djilid I s/d IV jang terpilih dan 167 Reproduksi Patung² dan Porselen jang terindah.

ukuran buku 381 x 304 mm.

Edisi lux satu set (5 djilid) Rp. 250.000,—

Edisi Biasa satu set (5 djilid) Rp. 150.000,—

Untuk pesanan luar kota tambah ongkos kirim dan pengepakan 5%



PENDJUAL TUNGGAL :

P.T. GUNUNG AGUNG

KWITANG 13 — TROMOLPOS 145

D J A K A R T A.

Tjabang³ P.T. GUNUNG AGUNG : Jogjakarta — Sukarnapura — Biak —
Manokwari — Tandjung Pinang.

Untuk pesanan Luar Negeri : GUNUNG AGUNG Ltd. Central
P.O. Box 722 Tokyo — Japan.

WARTA



Perdagangan

RECEIVED
AP 299 NOV 11 1966
433
V8 UNIV. WIS. LIBRARY
to



6

TAHUN KE-XVIII

6 DJULI 1965

MADJALAH

„WARTA PERDAGANGAN“

Terbit tiap 2 Minggu sekali

Diterbitkan oleh :

Departemen Perdagangan Dalam Negeri
beserta Urusan Perdagangan Luar Negeri
dari Kompartimen Luar Negeri/H.E.L.N.
dan Perdagangan Luar Negeri.

Pelindung :

J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/
Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri
BRIG. DJENDERAL A. JUSUF.

Pemimpin Umum :

Kepala Direktorat Marketing dan Research :
Ir. J. J. Pitoy M.A.

Staf Redaksi :

Staf Direktorat Marketing dan Research.

Penanggung Jawab :

Kepala Seksi Publikasi Madjalah
Anwar B. Harahap.

Pembantu Tetap :

Prof. Ir. Teko Sumodwirjo
Kolonel Jusuf Ramli
Major A. Rachman Rukmantara
R. Hertatijanto S.H.
Drs. Waskito
Dr. J. Panglaykim

Pembantu^a Khusus :

Kolonel Usman Ismail — Alamsjah S.B.P. —
R.H. Tuwaidan M.A. — Drs Sjaaf Muchtar
— Major Drs Sukadjat — Zahar — R. Isa —
Drs A. Aidit — Suprpto — Sudjadi —
A. Karim Usman S.H. — Dudy Djaya.

Alamat Redaksi dan Tata Usaha :

Madjalah „WARTA PERDAGANGAN“
Direktorat Marketing dan Research
Djalan Tanah Abang Timur No. 87
D J A K A R T A

Pelaksana/Pertjetakan :

Kepala Pertjetakan P.N. Karya Tjotas
Burdi Reksodirdjo.

Pembayaran uang langganan dilakukan dimuka dengan :

1. Penjetoran atas Rekening Madjalah
„Warta Perdagangan“ Kode No: KB/
W.A.-194, pada Bank Indonesia —
Dj: Thamrin, Djakarta.
2. Dinas Giro dan Tjek Pos atau dengan
pos wissel jang langsung dialamatkan
kepada Tata Usaha Warta Perdagangan
Direktorat Marketing dan Research.

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar Redaksi	1
2. Wawantjara Menteri Perdagangan Brig. Djen. A. Jusuf dengan pers ibukota	2
3. Dekrit Presiden pada tanggal 5 Djuli 1959	4
4. Lambang Negara Republik Indonesia	5
5. Resapkan dan amalkan „Lima Azimat“ Re- volusi Indonesia	6
6. Kwalitas daun tembakau dan pengaruhnja terhadap harga pendjualan	7
7. Pembentukan Badan Pendjualan Tembakau Indonesia	10
8. Reorganisasi Lembaga Tembakau	11
9. Susunan Pengurus Lembaga Tembakau	12
10. Pembentukan Kompartimen Perindustrian Rakjat	13
11. Pengertian dan Masalah „Pelaksanaan“	14
12. I m p o r :	
a. Dengan Devisa Pelengkap	19
b. Dengan Alokasi Devisa	20
c. Barang ² dan Djasa ² untuk Projek ² Pro- duction Sharing	21
13. Menjambut „Hari Bank“	22
14. Pengumuman ² Dept. Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri	24
15. Organisasi dan Susunan Direktorat Hu- bungan Perdagangan Luar Negeri	26
16. Rumusan Induk Sistim Pendidikan Nasio- nal Pantjasila	27
17a. Variaberita singkat Ekonomi/Perdagangan Internasional	31
17b. Variaberita singkat Ekonomi/Perdagangan Dalam Negeri	32
18. Pengumuman ² Biro Lalu Lintas Devisa :	
a. Batas waktu pendaftaran dan penjimpa- nan efek-efek :	33
b. Hubungan bajar membajar dengan RRT dan Pakistan	34
c. Uang muka untuk ongkos-ongkos ka- pal asing	35
20. Penentuan harga penjerahan Karet berda- sarkan perbedaan freight	36
21. Harga Penjerahan Barang ² Ekspor Golong- an II	37

Keterangan Gambar Kulit muka :

Kwalitas daun tembakau pegang peranan dalam pen-
entuan harga, oleh karena itu perlu penjortiran
jang teliti.

Surat Izin terbit No. 21A/SK/UPPG/SIT-1
tanggal 17-4-1965.

Dengan Raahmat Tuhan Jang Maha Esa, dan Atas Nama Rakjat Indonesia, maka Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata, pada enam tahun jang lalu, dengan "Dekrit 5 Djuli 1959" teiah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap Bangsa dan seluruh Tumpahdarah Indonesia.

Dalam rangka melandjutkan usaha untuk menjempuinakan dan untuk lebih mempertinggi dajakerdja Kabinet Dwikora, dengan Keputusan Presiden R.I. No. 187 tertanggal 23 Djuni ditetapkan Pembentukan Kompartimen Perindustrian Rakjat.

Resapkan dan Amalkan LIMA AZIMAT REVOLUSI INDONESIA, demikianlah antara lain Komando/Instruksi Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Pemimpin Tertinggi Front Nasional tertanggal 24 dan 25 Djuni 1965, agar dengan demikian dalam keadaan apapun kita tetap setia kepada idee besar melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat Indonesia dan Amanat Penderitaan Rakjat diseluruh Dunia.

Sambutan/Reportase/Tanggapan pers mengenai wawantjara Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri Brigdjen A. Jusuf dengan para wartawan Ibukota jang terutama berkisar pada kebidjaksanaan jang ditempuh oleh beliau dalam memimpin Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri pada umumnja dan pemasaran tembakau pada chususnya, dikutip setjara "in extenso" dari surat kabar-surat kabar/harian jang bersangkutan.

Sistim Pendidikan Nasional PANTJASILA, jang sudah mendjadi Keputusan Presiden, kiranja perlu ditjamkan oleh setiap warganegara dan patriot Indonesia oleh karena pendidikan merupakan unsur mutlak dalam Nation dan Character building.

Hari Bank untuk pertama kalinya diperingati dan dirajakan pada tanggal 5 Djuli 1963 setelah P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi menetapkan hari lahirnja Bank Negara Indonesia sebagai bank negara pertama jang lahir dalam kantjah revolusi jaitu tanggal 5 Djuli 1946 sebagai HARI BANK. Untuk menjambut Hari Bank 1965 sebagai Hari Bank ke III, dapatlah Sdr. membatja dalam nomor ini Pidato Pimpinan Urusan Bank Sentral jang diujapkan dimuka tjorong TVRI oleh Gubernur Pengganti Bank Indonesia, Sdr. Hertatijanto S.H.

Dimulai dengan nomor ini dikandung maksud untuk setjara berkala mengasuh/menjadjikan rubrik khusus mengenai Variaberita Singkat Ekonomi/Perdagangan Internasional dan rubrik khusus jang berdjulud Variaberita Singkat Ekonomi/Perdagangan Dalam Negeri.

Keputusan-Keputusan Bersama Menteri Perkebunan dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri mengenai pembentukan Badan Pen-
ajualan Tembakau Indonesia jang berkedudukan di Bremen dan diberi nama "Tembakau Indonesia GmbH" disingkat "TEMINDO", untuk mentjapai kedudukan jang kuat dan aktip dalam perdagangan tembakau internasional dan tentang Reorganisasi Lembaga Tembakau sehingga kedudukan dan wewenang Lembaga Tembakau ini lebih tegas dalam mendjalankan peranannja untuk mendjamin kelangsungan budidaja pertembakauan Indonesia pada umumnja.

Bila dalam nomor-nomor sebelumnya telah dimuat ketentuan-ketentuan mengenai barang-barang jang dapat diimpor dengan S.P.P. maupun impor atas dasar counter impor dari 30% dari hasil ekspor (Sabang), dalam nomor ini disadjikan ketentuan-ketentuan mengenai barang-barang jang dapat diimpor dengan devisa pelengkap; ketentuan-ketentuan baru lainnja dalam bidang impor adalah Impor dengan Alokasi Devisa dan Impor dalam rangka Production Sharing.

WAWANTJARA MENTERI BRIGDJEN ACHMAD JUSUF DENGAN PERS IBUKOTA

Menteri Perdagangan Dalam Negeri Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri Brigdjen Achmad Jusuf, Djum'at siang tanggal 2 Djuli 1965, sesudah menemui Pd. Presiden Dr. J. Leimena ditempa kediaman beliau untuk memberikan laporan mengenai kebidjaksanaan Departemen Perdagangan Dalam Negeri, Urusan Perdagangan Luar Negeri pada umumnja dan kebidjaksanaan dalam pemasaran tembakau pada khususnja, telah mengadakan wawantjara singkat dengan pers Ibukota dan LKBN Antara.

Dibawah ini dikutip beberapa reportase wawantjara tersebut sebagaimana jang dimuat dalam berbagai surat kabar Ibukota dan LKBN Antara.

— Menteri Perdagangan Tegas

KEMBALIKAN RASA PENGABDIAN DAN RASA PERDJUANGAN PADA TIAP UNSUR DI BIDANG PEREKONOMIAN.

Demikianlah djudul dari Harian "Berita Yudha" dalam penerbitannja pada tanggal 3 Djuli 1965. Harian ini menulis antara lain: "Dalam usaha mentjapai kedudukan kuat dan aktip, oleh Pemerintah akan dibentuk suatu usaha pendjualan tembakau jang terdiri 100% unsur-unsur Nasional dengan modal Nasional pula". Dengan adanja pembaharuan pemasaran jaitu dengan mengganti personalia dan sistim njaja, ternjata harga jang ditjapai dapat dinaikkan dengan 40 sampai 45% dari taksiran harga jang ole makelar-makelar asing. Kebidjaksanaan lain jang diambil Pemerintah adalah memformulir kembali kedudukan lembaga-lembaga kita, seperti umpamanya lembaga tembakau. "Hal itu supaja ada wewenang dan tugas jang djelas tegas, demi efficiency jang kita perlukan".

Mengutip Menteri jang menjinggung soal efficiency djatakan bahwa, "rasa tanggungjawab, rasa pengabdian dan rasa perdjjuangan harus dikembalikan kepada setiap unsur jang tersangkut dibidang perekonomian kita. Demi efficiency, tidak ada pilihan lain ketjuali kapabilitas dan kedjjudjuran. Dengan pedoman inilah Menteri Jusuf telah mengambil kebidjaksanaan mengadakan rasionalisasi dan sanering personalia dilingkungan Departemennja dan perwakilan-perwakilan perdagangan kita diluar negeri".

Suratkabar tersebut mengemukakan penegasan jang diberikan oleh Menteri dalam hubungan ini: „bahwa demi rakjat dan revolusi, kita harus dapat berdiri diatas segala kepentingan pribadi dan golongan".

„Kepada pers Menteri mengadajak kerdjasamanja jang baik", demikian "Berita Yudha" melandjutkan pemberitaannja. „Didalam menghadapi persoalan-persoalan jang timbul, djanganlah buru-buru menuduh dan menjalahkan, tetapi turut-serta menjelidiki dimana titik-titik timbulnja persoalan itu".

Disebutkan pula bahwa dewasa ini „oleh Menteri Perdagangan djuga sedang dilakukan penjelidikan besar-besaran, tentang sebab-sebab pembentukan harga serta alokasi barang-barang tertentu, seperti gula dan minjak tanah jang ternjata harganja djauh lebih tinggi daripada jang telah ditetapkan".

- SEBAGIAN KENDARAAN BERMOTOR PERUSAHAAN² NIAGA NEGARA AKAN DIDJUAL
- PNN Diluar Negeri Dilarang Beli Mobil & Rumah
- Pegawai² Departemen Perdagangan Akan diberi Speda.

Demikianlah djudul berita "Sinar Harapan" tertanggal 2 Djuli 1965 jang menulis: „bahwa bun low-bungalow dan sebagian kendaraan bermotor (mobil) milik Perusahaan Niaga Negara (PNN) akan didjual, karena dianggapnja hal-hal itu hanja sebagai pemborosan, sedang PNN belum tahu beres mendapatkan untung. Demikianlah pula perwakilan-perwakilan PNN diluar negeri dilarang membeli mobil dan membeli atau membuat rumah-rumah untuk pegawai, karena mereka dapat menjewar tindakan itu untuk mentjegah pemborosan".

Dengan mengemukakan „usaha-usaha Menteri A. Jusuf untuk mengembalikan suasana kerdja jang baik, suasana kerdja jang harmonis", sehingga tertjapai efficiency kerdja jang tinggi", demikian „Sinar Harapan", jang melandjutkan reportasenja „pegawai-pegawai pada Departemen Perdagangan akan dibelikan speda, agar kehadiran mereka (jang mempergunakan bis atau truk² pengangkut pegawai) tidak terlambat dan pulangnja tidak tergesa-gesa. Speda itu akan merupakan hak milik".

Mengenai kebidaksanaan harga ditulis antara lain : "Selandjutnja dikatakan bahwa Menteri A. Jussekarang sedang giat menjelidiki saluran² perdagangan jang kadang² menimbulkan keadaan jang tidak seimbang dibidang harga. Diberi tjontoh misalnja mengenai harga minjak-tanah menurut harga jang ditentukan Pemerintah Rp. 0,45 per liter tetapi dipasaran bebas sekarang mendjadi Rp. 60,— per liter. Dikatakan banjak badan-badan ini itu jang ikut tjampur-tangan dalam hal penjaluran barang itu, sehingga menimbulkan keadaan harga jang kurang seimbang".

NU DUKUNG KEBIDJAKSANAAN JANG DITEMPUH MENTERI PERDAGANGAN

Dengan djudul ini "**Berita Yudha**" dalam terbitannja tertanggal 5 Djuli 1965 antara lain "Menjamatkan keterangan Menteri Perdagangan sekitar rasionalisasi dan efficiency Deperdag, dan perwakilannja luar negeri, tokoh PB Partai Nahdatul Ulama/wakil Gol. Islam di DPR-GR H. Djamaluddin Malik menjatakan sambutan hangatnja atas tindakan Menteri Jusuf tsb."

"Dikatakannja bahwa tindakan Menteri Jusuf tsb. adalah tindakan jang penuh kebidaksanaan dan sinis sifatnja dan sudah patut didukung oleh seluruh golongan nasional progressif revolusioner". Bahkan, demikian H. Djamaluddin Malik lebih djauh "tindakan kebidaksanaan Brigdjen A. Jusuf itu patut didjadikan suri teladan oleh departemen-departemen lainnja. Mengachari keterangannja kepada pers. dikemukakan kejakinan tentu Menteri Jusuf akan mengikuti tindakan revolusioner itu dengan pe-
puran² lain jang sama semangatnja".

"DUKUNG MENPERDAG"

Demikian reportase jang sama seperti diatas jang dimuat dalam harian "**Angkatan Bersendjata**" tanggal 5 Djuli 1965.

KEBIDJAKSANAAN MENTERI BRIGDJEN JUSUF BIDJAKSANA DAN ORISINIL

Dengan kepala berita inilah surat kabar harian "Duta Masjarakat" mengutip sepenuhnya pemberitaan berita Yudha tsb. diatas.

"PENDJUALAN TEMBAKAU EX INDONESIA" adalah djudul reportase jang dibuat "**Warta Bhakti**" tanggal 2 Djuli 1965 jang menulis antara lain : "bahwa dalam pemasaran tembakau² kita di Eropa akan dibentuk suatu perusahaan pendjualan tembakau jang 100% terdiri dari unsur² nasional, jang merupakan penjatuan kekuatan nasional setjara aktif dalam pemasaran tembakau tersebut." Selandjutnja dikatakan bahwa dalam soal ekspor bahan hasil² dari Indonesia, Menteri hanja menghendaki satu matjam terminologi jaitu "barang ex-Indonesia".

"Warta Bhakti" djuga menulis antara lain : "Dalam menegaskan mengenai masalah tembakau ini Menteri Achmad Jusuf mendjelaskan, bahwa kita mentjoba suatu kedudukan dan aktif dalam bidang perdagangan tembakau diluar negeri jang tidak ditjampuri oleh unsur² asing, misalnja soal harga. Dikatakan, bahwa dalam pelelangan tembakau pada tahap III tahun ini telah ditjapai hasil 6 Djuta Deutsche Marks dari taksasi makelar asing".

Chusus mengenai pertembakauan, "**LKBN ANTARA**" antara lain menulis : "Dikatakan bahwa kita perlu membentuk kekuatan bersama dan melaksanakan kebidaksanaan dibidang pemasaran tembakau, karena kalau tidak maka pihak luar akansemau²nja sadja menentukan harga tembakau kita malah kitalah jang menghasilkan tembakau itu".

Ditegaskan pula dalam bulletin "Antara" tanggal 2 Djuli 1965 itu mengenai penggunaan istilah hasil-hasil ex Indonesia seperti berikut :

"HANYA ADA SATU ISTILAH"

"Menurut Menteri Perdagangan, dalam istilah² djenis tembakau sekarang ini ditanah air kita masih berlaku istilah² kuno jang membeda-bedakan hasil² tembakau perkebunan dan tembakau jang dihasilkan oleh tangan rakjat sendiri.

Tradisi kuno jang merugikan itu harus kita lenjapkan, sehingga dalam kamus kita sekarang ini hanya ada satu matjam tembakau, jaitu tembakau Indonesia. Istilah² kuno itu harus dihapuskan sama sekali, karena masih berbau kolonial jang berprasangka bahwa setiap hasil karya rakjat adalah djelek. Prasangka atau anggapan jang demikian itu harus kita kikis habis".

PERUSAHAAN PENDJUALAN TEMBAKAU MAU DIBENTUK

Demikian berita "Antara" tersebut diatas dikutip oleh harian "Bintang Timur" dalam penerbitannja tanggal 2 Djuli 1965.

"NEW TOBACCO MARKETING POLICY : TOBACCO SALAS TO BE SET UP" adalah djudul jang dipakai harian berbahasa Inggris "**The Indonesian Herald**" jang mengutip djuga berita "Antara" tersebut dalam edisinja tanggal 5 Djuli 1965.

Demikianlah telah kami sadjikan laporan/reportase pers Ibukota dan LKBN "Antara" mengenai swantjara Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri Brigdjen Achmad Jusuf.

Dekret

Dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

Dengan ini menjatakan dengan chidmat :

Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 jang disampaikan kepada segenap Rakjat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;

bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian terbesar Anggota-Anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipertjajakan oleh Rakjat kepadanya;

bahwa hal jang demikian, menimbulkan keadaan ketata-negaraan jang membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa serta merintangangi pembangunan semesta untuk mentjapai masyarakat jang adil dan makmur;

bahwa dengan dukungan sebagian terbesar Rakjat Indonesia dan didorong oleh keja-kinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunja djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi;

bahwa kami berkejakinan, bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendji-wai Undang-Undang Dasar 1945, dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Maka atas dasar-dasar tersebut diatas,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini dan tidak berlakunja lagi Undang-Undang Dasar Sementara;

Pembentukan Madjelis Permu jawaratan Rakjat Sementara, Jang terdiri atas Anggota-Anggota D.P.R. ditambah dengan utusan dari Daerah-Daerah dan Golongan-Golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Djuli 1959.

**ATAS NAMA RAKJAT INDONESIA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN PERANG**

(S U K A R N O)

LAMBANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA



- Lukisan Garuda jang digantungi prisai dengan memakai paruh, sajak, ekor dan tjakar mewujudkan lambang tenaga pembangunan.
- Djumlah belai bulu :

Pada tiap' sajak	17
Pada ekor	8
Ketjil dibawah prisai	19
Ketjil dileher	45
- melambangkan hari proklamasi Kemerdekaan R.I. pada tanggal 17 Agustus 1945.
- Ditengah-tengah prisai, jang berbentuk djantung itu, terdapat sebuah garis hitam tebal jang maksudnja melukiskan Katulistiwa (equator) jang melalui pulau' Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Irian.
 Dengan garis ini dinjatakan bahwa Republik Indonesia adalah satu-satunja Negara Asli didaerah Katulistiwa jang mentjapai Kedaulatan dan Kemerdekaannya dengan kekuatan dan tenaga sendiri.
- Lima buah ruang pada prisai itu masing-masing mewujudkan dasar Pantja Sila :
 1. Dasar Ketuhanan Jang Maha Esa terlukis dengan Nur Tjahaja diruangan tengah berbentuk Bintang jang bersudut lima.
 2. Dasar Kerakjatan dilukiskan dengan Kepala Banteng sebagai lambang tenaga Rakjat.
 3. Dasar Peri Kemanusiaan dilukiskan dengan Tali Rantai bermata bulatan dan persegi.
 4. Dasar Kebangsaan dilukiskan dengan Pohon Beringin.
 5. Dasar Keadilan Sosial dilukiskan dengan Kapas dan Padi, sebagai tanda tudjuan Kemakmuran.
- Sembojan "BHINNEKA TUNGGAL IKA" mengandung arti "Berbeda-beda tetapi tetap satu ajua".

KOMANDO PRESIDEN :

Resapkan dan Amalkan „Lima Azimat” Revolusi Indonesia

Instruksi Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Pemimpin Tertinggi Front Nasional no. 014/1965 jang dikeluarkan di Djakarta 25 Djuni 1965 selengkapnja adalah sbb:

Dengan ini saja instruksikan kepada **Front Nasional, Partai politik dan organisasi² massa serta golongan karya** diseluruh Indonesia supaja ber-sama² dengan alat² negara dan alat² revolusi lainnja :

1. Mempertinggi kewaspadaan dan kesiapsiagaan nasional;
2. Mengutamakan disiplin dan tanggung-djawab nasional;
3. Memperkokoh persatuan nasional dengan mengamalkan djiwa Deklarasi Bogor dan
4. Menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan golongan dan perseorangan; tatakrama Nasakom;
5. Meresapkan dan mengamalkan „lima azimat” revolusi Indonesia :
 1. Nasakom,
 2. Pantja Sila,
 3. Manipol/Usdek,
 4. Trisakti Tavip,
 5. Berdikari.

Dengan demikian dalam keadaan apapun kita tetap setia kepada idee besar melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia dan Amanat Penderitaan Rakyat diseluruh dunia.

KOMANDO PRESIDEN/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI

MEMANFAATKAN GERAKAN SUKARELAWAN DALAM MELAKSANAKAN DWIKORA.

1. **TUDJUAN UMUM :**
Melaksanakan Trisakti Tavip, chususnja Berdikari.
 2. **TUDJUAN CHUSUS :**
Memelihara kekompakan Nasakom didalam negeri, terutama selama Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno berada diluar negeri.
 3. **TUDJUAN LEBIH CHUSUS :**
Memanfaatkan gerakan sukarelawan untuk memelihara disiplin nasional dan tatakrama Nasakom, dalam rangka :
 - a. kewaspadaan jang militant berhubung dengan sinjalemen adanja rentjana „serangan terbatas” jang berkombinasi dengan subversi dan intervensi;
 - b. pengorganisasian dan latihan untuk mewujudkan kemampuan berdikari dibidang produksi.
 4. **SALURAN :**
Front Nasional, dengan Bantuan wibawa KOTI dan Pantja Tunggal.
 5. **BENTUK DAN TJARA :**
Memerintahkan kepada sukarelawan-sukarelawan Dwikora jang telah dan akan mendaftarkan diri kepada Front Nasional untuk :
 - a. Mengadakan appel-appel serempak **ditempat-tempat kerdja**, jang diikuti oleh sukarelawan-sukarelawan Dwikora jang mendjalankan peranan kerdja produktif dalam produksi pertanian (termasuk perkebunan dan industri; mahasiswa-mahasiswa dan pelajar-peladjar pada chususnja serta pemuda pada umumnya)
 - b. Sekaligus mengkongkritkan pembentukan unit-unit sukarelawan terketjil, kongruen dengan Kelompok Kerdja Front Nasional, dan melakukan pemilihan pimpinannja setjara demokratis;
 - c. Mengadakan gerakan meresapkan „lima azimat” Revolusi Indonesia :
 1. Nasakom
 2. Pantja Sila
 3. Manipol/Usdek
 4. Trisakti Tavip
 5. Berdikari.

dalam tiap unit sukarelawan dengan bantuan kader-kader Revolusi Angkatan Dwikora, lulusan Pergerakan Kader Nasakom jang telah mengalami testing, kader-kader lain jang telah mendapat pendidikan dari Front Nasional dan jang diserahkan atau diperbantukan oleh lembaga-lembaga/badan badan lain kepada Front Nasional;

 - d. Mengadakan gerakan-gerakan turba (turun kebawah) dalam melaksanakan a, b, dan c diatas.
6. **BIAJA :**
Kombinasi antara bantuan negara melalui Sekretariat Negara dan Front Nasional serta swadaja masyarakat, antara lain bantuan dari pengusaha-pengusaha swasta nasional dan domestik jang progressif.

DJAKARTA, 24 Djuni 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PEMIMPIN BESAR REVOLUSI
t.t.d.
SUKARNO.

KWALITAS DAUN TEMBAKAU DAN PENGARUHNJA TERHADAP HARGA PENDJUALAN

A. Tembakau Sumatra

Tembakau Sumatra panen 1963 sebagian besar kurang hudjan, sehingga pertumbuhan daunnja kurang begitu memuaskan, berakibat daun² kurang memperlihatkan kwalitas jang bermutu. Daunnja tebal² serta terlihat warna jang tidak rata (bont). Dalam garis besar tembakau Sumatra ini masih terdapat „basah” (vochtig) jang tentu mempunjai akibat kurang baik dalam warna.

Sortatie serta pengolahan tidaklah terdapat kesalahan² jang menondjol, sehingga daun tembakau jang kurang kehudjanan masih dapat memperoleh penilaian jang tjukup baik sebagai Deck-material.

Pada umumnja daun tembakau milik P.P.N. memperoleh penghargaan tjukup sesuai dengan kwalitas daun, terutama sebagai Deck-material. Sebaliknya tembakau Sumatra jang dihasilkan oleh „Tjinta Radja”, satu²nja perusahaan Swasta di Deli, sampai sekarang menundjukkan bahwa kwalitas daun tembakaunja makin tahun makin turun, baik produksi maupun kwalitasnja. Djika produksi tembakau Sumatra sebagai Deck-material sangat ketjil, sudah tentu kurang menarik untuk para pembeli terutama para industrie tjerutu. Pun kwalitas daun tembakau menentukan sampai dimana djauh dapat diperoleh harga setinggi mungkin. Djumlah procentage Deck-material tembakau „Tjinta Radja” sangat ketjil, djuga kwalitasnja kurang tjukup memuaskan. Kemungkinan sekali terletak didalam bidji jang sudah kurang baik sehingga perlu diperbaharui, kemungkinan kedua ialah bahwa tanah² jang dipergunakan oleh „Tjinta Radja”, kurang tjukup memenuhi sjarat² djika dibandingkan dengan tanah² milik P.P.N.

Baal tembakau P.P.N. masih terdapat kurang baik dalam pengepakannja sehingga setibanja di Bremen tembakau djadi kotjok dan berakibat daun²nja djadi robek (petjah).

Tembakau Vorstenlanden

Telah dimaklumi bahwa tembakau Vorstenlanden dalam tudjuan utama sebagai „Deck dan Umblatt” untuk panen 1963 telah terlihat adanja kemadjuan² dalam sortatie dan pengolahan, sehingga kwalitas daun tembakaunja tjukup menarik sebagai Deck dan Umblatt. Hanja lebar daun masih perlu diperbaiki dan lebih diteliti dalam pengerdjaannja mengingat karena tembakau vorsten-

landen terutama dikerdjakan sebagai Deck dan Umblatt setjara masinaal.

Daun² tembakau Vorstenlanden milik P.P.N. jang tergolong sebagai **deckblatt** dalam garis besarnya tjukup memenuhi sjarat² sebagai bahan deck, meskipun djumlahnja masih begitu ketjil. Bagi panen 1963 ini masih terdapat daun² jang tebal dan dibeberapa gudang P. P.N. terdapat adanja pembagian sortatie dalam djumlah baal jang ketjil sehingga mempengaruhi perkembangan harganja.

Sebaliknya terdapat pula pembagian sortatie dalam djumlah² jang besar (sampai 2.000 baal) jang berakibat pula penekanan pula dalam harga pendjualannja, karena tidak semua peminat berani mengadjukan tawarannya langsung dalam pelelangan sehingga persaingan harga kurang menguntungkan.

Tembakau Vorstenlanden milik Sawarno terlihat adanja kemadjuan² baik dalam kwalitas maupun pengolahannja; kemadjuan mana ialah karena untuk panen 1963 perusahaan tersebut telah mempergunakan bidji² jang sama dengan bidji² jang ditanam oleh P.P.N. Pun tanah jang mereka tanami termasuk tanah² jang tjukup memenuhi sjarat bagi tembakau Vorstenlanden. Djuga tembakau Vorstenlanden Sawarno procentage daun tembakau jang tergolong **deck-material** masih sedikit dan termasuk lembab (vochtig) dan disana-sini terdapat sedikit minjak (druk). Sebagian besar tergolong sebagai bahandalam (einlage), hanja daun kaki dan daun tengah termasuk sedikit tipis tapi masih kurang lebar².

Selain P.P.N. dan Dana-Milik, masih terdapat tembakau Vorstenlanden jang diusahakan oleh N.V. Ketandan di Klaten. Keadaan tembakaunja sebagian besar masih belum memenuhi sjarat² sebagai Umblatt, dan sudah tentu dinilai (dipergunakan) sebagai Einlage (bahan-dalam). Dalam sortatie serta pengolahannja tidak terdapat kesalahan² jang menondjol, daja-bakarnja kurang, daunnja masih tebal² serta djumlah lebar daun masih sangat ketjil. Kwalitas daun tembakau Vorstenlanden milik N.V. Ketandan ini sangat rapat pula hubungannja dengan bidji jang ditanam dan tanah jang dipergunakan.

Disamping N.V. Ketandan, masih ada satu perusahaan dagang negara jaitu P.N. Sedjati Bhakti jang djuga berusaha dalam tembakau Vorstenlanden. Kwalitas daun tembakaunja masih sangat mengetjewan, meskipun dalam sortatie dan pengolahan sudah menunjukkan kemadjuan². Sebagian besar tembakaunja dinilai sebagai einlage jang mana bu-

kanlah merupakan tudjuan utama, baik tembakau Vorstenlanden milik Sedjati Bhakti atau milik lain²nja. Daun²nja termasuk ketjil, terdapat banjak hidjau, suatu tanda kurang tua dalam waktu memungut, jang berakibat tidak mungkin memperoleh harga jang baik dalam pendjualannja. Sebagai daun putjuk jang sangat pendek², kurang dari ukuran pandjang ke-4, tidaklah begitu manfaat untuk diikat lebih-lebihan dengan sortatie jang sangat tadjam. Pun bidji Vorstenlanden jang ditanam oleh P.N. Sedjati Bhakti ini sangat berlainan sekali dengan bidji dari P.P.N. — Vorstenland. Daja-bakar tembakau Vorstenland Sedjati Bhakti masih kurang baik, lebih² karena kwalitasnja dinilai sebagai bahan dalam.

C. Tembakau Besuki.

Pada sebagian besar panen tahun 1963 untuk tembakau Besuki telah menundjukan kurang memperoleh hudjan (onberegend), jang mana berakibat pada kwalitas dan pertumbuhan daunnja.

Dengan kurang memperoleh hudjan terutama dalam waktu panenannja (pungutan) maka procentage deck dan umblatt tentu kurang. Daunnja termasuk tebal², kurang elastis sehingga kurang memenuhi sjarat² sebagai deck dan umblatt. Pun terdapat pula beberapa party tembakau jang kurang baik daja-bakarnja hal mana sebagai umblatt kurang dapat memperoleh harga jang baik.

Pun tembakau P.P.N. dalam garis besarnya kurang memperoleh tjukup hudjan dan sudah tentu kwalitas daunnja terutama deck dan umblatt kurang begitu baik, meskipun ada beberapa party ketjil jang telah dinilai sebagai deckblatt baik, terutama pada KAK-partyen.

Jang telah mendapatkan penilaian sebagai umblatt baik ialah partyen PPN/103 pada KAK dan TNG-nja, sedangnja PUT partyennja dinilai sebagai bahan einlage baik, terutama karena tembakau²nja sudah mulai diikat dengan daun tembakau, sehingga dalam pengerdjaannja tidak memerlukan lagi tenaga extra untuk membuang tali²nja jang sangat menguntungkan bagi para industrie.

Sangat menjolok bahwa PPN dapat menjadikan daun tembakau-lepas (los-blatt) dalam djumlah² besar lagi sehat dan bersih, tidak tertjampur dengan kotoran² lain seperti jang lazimnja terdapat bagi djenis tembakau ini, seperti potongan² tali, gagang² dsb.

Partyen los-blatt milik PPN memperoleh pembeli²nja tidak sadsja di Djerman, tapi merata keseluruh Eropa Barat, terutama di Inggris dan Belanda.

Mengenai pengepakan dan sortatie tembakau PPN. umumnja termasuk baik meskipun dju-

ga masih terdapat bahwa dalam sortatie daun utuh terdapat djuga daun petjah.

Tembakau Besuki milik Swasta pun terlihat adanja sifat² kurang kehudjanan (onberegend) dan partyen jang tergolong deck material sangat ketjil djumlahnja karena sebagian telah dinilai sebagai umblatt, terutama milik Banju Mukti, TEIC, Intraport, Liem Swie Hwa, Tulusredjo dan Megananda.

Adapun tembakau milik para Swasta lain²nja sebagian besar dinilai sebagai einlage meskipun disana-sini masih terdapat pula beberapa party ketjil sebagai umblatt baik.

Umumnja mengenai sortatie dan pengolahan terdapat kemandjuan jang tjukup memuaskan, sehingga kwalitas daun tembakaunja masih tjukup menarik. meskipun diatas tadi dikatakan bahwa umumnja tembakaunja kurang hudjan.

Sebagai deck dan umblatt bagi tembakau milik para Swasta ini djuga daunnja termasuk kurang lebar², hanja milik TEIC-lah jang dapat dikatakan tergolong baik kwalitas tembakaunja sebagai deck dan umblatt, hanja disajangkan bahwa dalam sortatie pandjang bagi tembakau TEIC. tidak terdapat perbedaan antara pandjang ke 2 dan ke 3 sehingga dalam penilaian tembakaunja sudah tentu dipukulratakan sadsja ke-ukuran jang lebih ketjil. Djuga sortatie pandjang seperti tembakau TEIC tsb. terdapat pada tembakau milik Carya Ltd.

Djuga pengikatan dengan daun tembakau seperti jang telah dikemukakan diatas mengenai tembakau PPN telah pula dilaksanakan pada tembakau milik Swasta, bahkan bukan sadsja untuk daun putjuk, tapi bagi daun tembakau jang kiranja dipakai untuk bahan dalam (einlage) dan terutama konsumsi untuk Amerika.

Pengikatan dengan daun tembakau tsb mendapat sambutan jang baik sekali dari para industri, karena dengan demikian mereka akan memperoleh keuntungan² baik dalam waktu maupun perongkosannja serta memperketjil kemungkinan adanja tjampuran² potongan² tali dsb. jang dapat mempengaruhi rasa dan aroma tjerutunja.

Pun para pengusaha Swasta dalam panen tahun 1963 banjak menjadikan daun lepas (los-blatt) jang bermutu baik dan bersih tidak tertjampur dengan lain² kotoran bukan daun tembakau.

Los-blatt milik para Swasta djuga telah memperoleh pasaran jang luas dikalangan para pengusaha tjerutu di-negara² Eropa Barat. Tembakau milik para "New-Comers" Swasta sebagian besar merupakan bahan-dalam jang bermutu tjukup baik dan sedikit sebagai umblatt jang kwalitasnja masih di-ragu²kan oleh para pembeli di Eropa Barat dan ter-

tama di Nederland, karena mereka belum mengenalnja.

Dalam sortatie masih terdapat banjak jang variable, terutama dalam sortatie kwalitas warna dan pandjang, begitupun dalam pengolahan masih kelihatan kurang sempurna.

Tembakau Lumadjang

Tembakau Lumadjang VO panen 1964 merupakan kwalitas tjukup baik, hanja warnanja kurang tjukup memuaskan. Pun daun²nja masih kurang lebar² dan kurang pandjang serta tidak begitu "wollig" jang lazimnja dimiliki oleh tembakau Lumadjang, meskipun bukan termasuk kwalitas "Krungsung".

Perhatian terhadap tembakau Lumadjang terutama VO masih tjukup besar dan setiap tahunnja masih dapat didjual sampai k.l. 10.000 baal untuk mendjaga djangan sampai pembeli² tembakau Lumadjang ini mentjari djenis tembakau lain negara.

Tembakau Banjumas

Djenis tembakau Banjumas masih belum begitu terkenal dikalangan para pengusaha tjerutu serta pasarannja pun masih terbatas

Sampai waktu ini jang mengusahakan tembakau Banjumas jang terbesar ialah T.E.I.C. dan pengusaha Swasta lain.

C.V. Banjumas dalam waktu belakangan ini tidak menundjukkan kemadjuan² dalam usahanja.

Untuk panen 1963 bagi tembakau Banjumas dapat dikatakan tjukup dapat hudjan sehingga kwalitasnja pun termasuk baik, hanja pada ukuran pandjang ke 1 masih sangat kurang.

Sebagian besar tembakau Banjumas dipakai sebagai bahan-dalam disampingnja ada beberapa partyen jang tergolong sebagai umblatt jang dinilai "sedang", karena daunnja kurang lebar dan elastis serta daja-bakarnja kurang baik.

Tembakau Kedu

Djuga tembakau Kedu panen 1963 kurang mendapat hudjan jang mana daunnja termasuk tebal dan agak manis.

Kwalitas tembakau Kedu umumnja sudah mundur, daun²nja ketjil dan pendek² kebanyakan gagang² jang menondjol. Lebih² kalau terdapat daun jang berminjak maka beratnja akan lebih bertambah.

Terutama pada tembakau Kedu/VO jang sering² memperoleh kesukaran dalam pendjualannja, karena untuk djenis ini belum ada peminat jang tertentu.

G. Tembakau Rembang/Djombang

Djumlah produksi tembakau Rembang dan Djombang makin tahun makin kurang dan kwalitasnja pun sangat rendah, kebanyakan hanja gagang²nja jang menondjol besar² jang tentu menambah berat.

Daun²nja sendiri sangat sempit² dan ketjil² serta hampir² tidak mempunjai daja bakar.

Achir² ini kesukaran² dalam pendjualan lebih sering dialami karena ditjampur dengan tembakau Virginia Low-Grade, sehingga memberikan bau jang lebih manis. Dengan sendirinja tembakau Rembang/Djombang jang asli akan tertekan kebawah harganja karena adanya tjampuran dengan tembakau Virginia tsb.

H. Tembakau Madura :

Meskipun dalam djumlah dan kwalitas tidak begitu tinggi, namun tembakau Madura masih tetap dapat didjual dengan lantjar.

Sampai sekarang belum ada tanda² tjampuran dengan tembakau Virginia. Tembakau Madura memang sudah terkenal terutama dalam warnanja jang begitu merah terang, hanja disajangkan bahwa masih terdapat kekurangan², diantaranya :

- a. Sukar dibakar
- b. Daun-daunnja kurang lebar
- c. Gagang² sangat besar² (tebal)

Dengan adanya tjelaan²/kekurangan² tsb. diatas, maka harga tembakau Madura tidak dapat diperkembangkan lebih baik dan pasarannja pun akan terbatas.

I. Tembakau Moris (Asepan)

Dalam tahun 1964 di Bremen telah mulai datang tembakau jang di-asap dan disebut Besuki/VO, malahan sampai ada jang disebut Besuki/*Na-oogst*.

Sebagai tembakau Besuki/VO inipun sudah mempengaruhi perkembangan harga untuk tembakau Besuki/VO jang asli, jang berasal dari bidji Kasturi-Merketek dsb. jang daun²nja dikeringkan dibawah sinar matahari.

Sudah dimaklumi bahwa daun Besuki/VO dikeringkan diluar gudang² untuk didjemur, sehingga memperkurang kemungkinan djumlah daun tembakau jang berminjak, ketjuali kalau daun hidjau²-nja ditumpuk sedemikian rupa sehingga timbul kerusakan².

Kalau tembakau Kasturi Asepan ini disebut Besuki/VO tidak dapat dibenarkan mengingat dalam tjara² pengolahannja.

Jang sangat menjolok ialah bahwa tembakau Kasturi Asepan jang disebut "Moris"; ini sudah ada jang dimasukkan sebagai Besuki/
Bersambung ke halaman 12.

PEMBENTUKAN BADAN PENJUALAN TEMBAKAU INDONESIA

Dengan pertimbangan agar pendjualan tembakau Indonesia diluar Negeri dilaksanakan sebagai suatu front dari para eksportir tembakau Indonesia, chususnja eksportir Niaga Negara dan pengusaha-pengusaha Swasta, dalam menghadapi konsumen tembakau diluar Negeri, dan untuk mendapatkan hasil devisa jang sebesar-besarnja dari hasil Tembakau Indonesia, maka dengan Surat Keputusan Bersama Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Menteri Perkebunan : No. 0101/6/MPLN/SKB/65

No. SK/83/Men. Perk./1965

tertanggal dan mulai berlaku 23 Djuni 1965 ditetapkan pembentukan Badan Pendjualan Tembakau Indonesia.

Badan Pendjualan Tembakau ini berkedudukan di Bremen dan diberi nama "Tembakau Indonesia" GmbH disingkat "Temindo" GmbH. Adapun ketentuan-ketentuan tentang Badan ini antara lain adalah sbb. :

1. Temindo GmbH merupakan suatu badan hukum jang disesuaikan dengan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan jang berlaku untuk Djerman Barat dengan modal statuter sebesar DM. 500.000 (lima ratus ribu DM) dan

modal jang distor sebesar DM. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu DM) jang disediakan oleh para eksportir tembakau/pemegang saham.

2. Semua eksportir tembakau Indonesia jang terdiri dari Perusahaan Niaga Negara dan Swasta diwadjibkan menjadi pemegang saham dari Temindo GmbH.
3. Seluruh pengiriman tembakau setjara konsinjasi dari pemegang saham diharuskan untuk menjalurkan pendjualannja kepada Temindo GmbH.
4. Direksi Temindo GmbH. terdiri dari 3 orang jaitu seorang dari Perusahaan Niaga Negara dan 2 orang dari Pengusaha Swasta jang diangkat oleh Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri dengan mendengar saran-saran dari pemegang saham.
5. Ketentuan-ketentuan lainnja mengenai pelaksanaan pembentukan Temindo GmbH ini diatur oleh Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri.

Djakarta, 26 Djuni 1965.—



Supaja daun tembakau tidak lembah dan berminjak perlu dikeringkan/didjemur diluar gudang.

Organisasi Lembaga Tembakau

Untuk mendjamin setjara integral kelangsungan didaja pertembakauan dan agar hasil tembakau pat memberi kemanfaatan jang sebesar-besarnya bagi Negara Indonesia pada keseluruhannya, maka dengan Keputusan Bersama Menteri Perkebunan dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri tanggal 30 Djuni 1965 No. 90/Men. Perk./1965

ditinjau kembali dan ditetapkan Kedudukan, Tugas dan Susunan Lembaga Tembakau jang baru sebagai berikut :

Kedudukan Lembaga Tembakau adalah sebagai „Badan Penasehat” dari Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Menteri Perkebunan.

Lembaga Tembakau bertugas memberi pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul konkrit baik diminta atau tidak kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Menteri Perkebunan jang bertujuan untuk mendjamin setjara integral kelangsungan budidaja pertembakauan agar dapat memberi kemanfaatan jang sebesar-besarnya bagi Negara dan masyarakat pada keseluruhannya.

Lembaga Tembakau bertugas untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul konkrit kepada :

- a. Menteri Perkebunan: mengenai hal-hal jang berhubungan dengan usaha-usaha untuk mempertinggi produksi tembakau;
- b. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri: mengenai hal-hal jang berhubungan dengan pengaturan tataniaga (marketing) cq. penjaluran hasil produksi tembakau kepada aparat-aparat ekspor;
- c. Menteri Perkebunan dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri : mengenai hal-hal jang berhubungan dengan usaha-usaha dalam bidang processing, upgrading, warehousing/storage dan standarisasi kwalita tembakau.

Kegiatan-kegiatan Lembaga Tembakau adalah antara lain :

- a. menjelenggarakan research dalam bidang mempertinggi produksi tembakau a.l. bibit unggul, pembrantasan hama/penjakit termasuk kemungkinan-kemungkinan memperluas areal tanaman tembakau;
- b. memberikan penerangan-penerangan jang seintensip-intensipnya kepada para petani tembakau pada khususnya mengenai usaha-

usaha untuk mempertinggi produksi tembakau dengan tjara antara lain menerbitkan pamphlets/leaflets dan mempertundjukkan film mengenai tjara-tjara bertjotjok tanam, membrantasan hama/penjakit, tjara-tjara memelihara dan mempertinggi kwalita tembakau;

- c. dalam rangka ekonomi terpimpin menjiapkan perumusan pola kanalisasi hasil tembakau dari si petani sampai ke aparat-aparat ekspor;
 - d. melaksanakan tugas-tugas/kegiatan-kegiatan lainnya jang ditetapkan oleh Menteri Perkebunan dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri.
5. Lembaga Tembakau dipimpin oleh Pengurus Pleno jang terdiri dari :
- a. Seorang Ketua. merangkap anggota jang ditundjuk oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri;
 - b. Seorang Wakil Ketua. merangkap anggota jang ditundjuk oleh Menteri Perkebunan;
 - c. Seorang Wakil dari Kompartimen Perindustrian Rakjat sebagai anggota;
 - d. Seorang Wakil dari Kompartimen Pertanian dan Agraria sebagai anggota;
 - e. Seorang Wakil dari Direktorat Ekspor sebagai anggota;
 - f. Seorang Wakil dari Direktorat Marketing dan Research sebagai anggota;
 - g. Seorang Pedjabat jang ditundjuk oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri sebagai anggota merangkap Sekretaris.
6. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari dari Lembaga Tembakau, dibentuk **Pengurus Harian** jang terdiri dari :
- a. Ketua : Ketua Pengurus Pleno;
 - b. Sekretaris : Sekretaris Pengurus Pleno;
 - c. Anggota : Salah seorang anggota Pengurus Pleno jang ditetapkan oleh Ketua.
7. a. Dimana dianggap perlu di daerah-daerah penghasil tembakau dapat dibentuk Tjabang-tjabang Lembaga Tembakau;
- b. Susunan dan Organisasi Tjabang-tjabang Lembaga Tembakau ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri.
8. Pembiajaan Lembaga Tembakau dibebankan pada pungutan/asinjasi tembakau dan lain-lain pungutan jang sah.

Bersambung ke hlm. 12

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA TEMBAKAU

Sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Perkebunan dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri mengenai Reorganisasi Lembaga Tembakau, telah dikeluarkan pula Surat Keputusan Bersama No. : _____ Menteri Per-

092/MPDN/SK/65

kebunan dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri tertanggal dan mulai berlaku 30 Djuni 1965, jang menetapkan pengangkatan anggota² Pengurus Lembaga Tembakau.

Susunan Pengurus Lembaga Tembakau menurut Surat Keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

1. **R. Prijatno Wimbowibowo**, dari Departemen Perdagangan Dalam Negeri sebagai Anggota merangkap **Ketua**;
2. **Ir. Soepardan Soerjohodjo**, dari Departemen Perkebunan sebagai Anggota merangkap **Wakil Ketua**;
3. **Amien Tjokrosoeseno**, dari Kompartimen Pertanian dan Agraria sebagai Anggota;
4. **E.R. Wakkary**, dari Direktorat Marketing dan Research sebagai Anggota;
5. **A.N. Perpatih**, dari Direktorat Ekspor sebagai Anggota;
6. **Ir. Momo Ratnawidjaja**, dari Kompartimen Perindustrian Rakjat sebagai Anggota;
7. **Dt. St. Moh. Sjah**, dari Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri sebagai Anggota merangkap **Sekretaris**.

PELELANGAN TEMBAKAU INDONESIA DI BREMEN

Pada pelelangan tembakau ekspor Indonesia jang ketiga tahun ini di Bremen pada tanggal 25 Djuni 1965 telah ditjapai omzet sebanjak 16,1 djuta DM (kira² 4 djuta US dollar).

Harga-harganja setelah pelelangan untuk tembakau-Kamerun di Paris adalah sangat menguntungkan. Pendjualan jang tertingi adalah sebuah party dengan kira-kira 21 US. dollar perkilo, jang dibeli oleh pedagang-pedagang Swedia. Penawaran tembakau seluruhnja sebanjak 5.519 baal telah tjepat habis terdjual karena ada banjak peminat-peminat internasional.

Harga-harganja pada umumnja lebih tinggi daripada pelelangan terdahulu.

REORGANISASI.....

Sambungan halaman 11.

9. Lembaga Tembakau dalam melaksanakan tugas-tugasnja menerima instruksi-instruksi dari dan bertanggung-djawab kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Menteri Perkebunan melalui Ketua Lembaga Tembakau.

Sambungan halaman 9.

Na-oogst. Memang sepintas lalu bagi jang bukan ahli tembakau, sangatlah sukar untuk dapat membedakan Kasturi Asepan "Moris" dengan tembakau Besuki/VO jang berminjak.

Warna daun tembakau "Moris" tjokrat² jang merata, tebal, kaku dan asepan sangat kurang baik djika dibakar dan daun²nja berbau "asepan". Lebih sukar lagi dalam penilaian kalau daun tembakau "Moris" tsb. dibuat sebagai gruis (los-blatt).

Dengan menjebut tembakau Asepan "Moris" sebagai Besuki/NO akan memperoleh akibat jang sukar diperbaharui dihari depan baal tembakau *Besuki/NO asli*, jang umumnya telah memperoleh kepertajaan begitu lu dari para pembeli diseluruh Eropa Barat dan Amerika Serikat.

Telah ada tanda² tjampuran tembakau *Moris* sebagai Besuki/NO pada perusahaan negeri, diantaranya "Marga-Bhakti" sebanjak 400 baal dan "Djaja-Bhakti" sebanjak 100 baal, jang dibuat sebagai gruis. Sudah tentu tidak mungkin tembakau tsb. dapat didjual dengan harga jang baik dan menawan. Jang sangat dichawatirkan ialah terutamanya mengingat nama dan kepertajaan terhadap tembakau *Besuki/Na-oogst* sudah begitu baik selama ber-tahun², dengan adanya tsb. diatas, kemungkinan dihari depan akan datang dan memperoleh tjelaan² dari pembeli jang sudah tentu sukarlah untuk membeli baiki dan menanamkan kepertajaan lagi. Lebih² kalau tembakau "Moris" tsb. terdjual sampai masuk dipasar lelang, akan ciptuhlah nama Besuki-Naoogst didepan mata para pembeli. Untuk meneliti setiap baal jang akan diadjudkan dipasar lelang sangatlah sukar, mengingat akan ketentuan² dalam persiapannja telah dilakukan djauh lebih dahulu, melahan kadang² tembakau masih dapat perdjalanannya telah dimasukkan dalam rencana lelang.

K. Tembakau Bojolali (Asepan)

Dalam tahun 1964 telah diadakan pertjobaan pendjualan tembakau Asepan Bojolali jang kwalitasnja menjerupai djenis tembakau American-Kentucky, jang sudah tentu sing² membawa sifat² sendiri.

Pertama-tama jang mengadakan pertjobaan baru TEIC. sebanjak kl. 100 baal dan kemudian disusul dengan kl. 850 baal; ada pembelinja suatu perusahaan di Antwerpen.

Perluasan pasar tembakau Asepan Bojolali sedang giat diusahakan, baik di Djerman maupun di Nederland.

PEMBENTUKAN KOMPARTIMEN PERINDUSTRIAN RAKJAT

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 187 Tahun 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melanjutkan usaha untuk menjempurnakan dan untuk lebih mempertinggi daya kerdja Kabinet Dwikora, dipandang perlu untuk mengeluarkan Departemen Perindustrian Rakjat dari lingkungan Kompartimen Pembangunan dan meningkatkannya menjadi Kompartimen Perindustrian Rakjat jang akan mengkoordinir 3 (tiga) Departemen dibawah pimpinan Menteri Koordinator Kompartimen;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannya surat Keputusan ini :

Pertama :

- a. Mengeluarkan Departemen Perindustrian Rakjat dari lingkungan Kompartimen Pembangunan dan meningkatkannya menjadi Kompartimen Perindustrian Rakjat;
- b. Membagi Departemen Perindustrian Rakjat jang lama menjadi 3 (tiga) Departemen jang terdiri dari :
 1. Departemen Perindustrian Tekstil,
 2. Departemen Perindustrian Ringan,
 3. Departemen Perindustrian Keradjinan.

Kedua :

Mengangkat :

1. Major Djenderal TNI Dr. AZIS SALEH
— sebagai Menteri Koordinator Kompartimen Perindustrian Rakjat merangkap menjadi Menteri Perindustrian Keradjinan.
2. Brigadir Djenderal TNI D. ASHARI, ASSISTEN VII Menteri/PANGAD
— sebagai Menteri Perindustrian Tekstil.
3. Brigadir Djenderal TNI M. JUSUF, Panglima KODAM XIV/HASANNUDDIN, Makasar
— sebagai Menteri Perindustrian Ringan
4. T.D. PARDEDE, Presiden Direktur Perindustrian di Medan
— sebagai Menteri diperbantukan pada Menko Perindustrian Rakjat untuk "Berdikari".

Ketiga :

Membebasikan dengan hormat Major Djenderal Dr. Azis Saleh dari djabatannya sebagai Menteri Perindustrian Rakjat, dengan utjapan



J.M. Menko Kompartimen Perindustrian Rakjat
Major Djenderal TNI Dr. AZIS SAI.FH

terima kasih atas djasa-djasannya jang telah disumbangkannya terhadap Negara selama memangku djabatan tersebut diatas.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 23 Djuni 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(S U K A R N O).

TUGAS-TUGAS DEPARTEMEN DALAM LINGKUNGAN KOMPARTIMEN PERINDUSTRIAN RAKJAT

Adapun tugas-tugas dari ketiga Departemen didalam Kompartimen Perindustrian Rakjat adalah sbb.:

1. Departemen Perindustrian Tekstil, tugasnya meliputi segenap usaha pertekstilan dan sandang;
2. Departemen Perindustrian Keradjinan, bertugas mengatur perindustrian rumah tangga (home industry), dengan tudjuan melaksanakan amanat Presiden, agar segenap rakjat ikut serta dalam produksi;
3. Departemen Perindustrian Ringan, bertugas mengatur segala djenis industri jang belum tertjakup oleh kedua Departemen tersebut diatas.

„Pelaksanaan”

(3)

A. TUJUAN PELAKSANAAN UNTUK MEREALISIR „PERENTJANAAN”.

Tujuan dari suatu rencana ialah untuk men-tjapai suatu objective dengan djalan sesempurna mungkin, dimana diharapkan objective ini dapat ditjapai pada waktu, djumlah, kwalitas yang telah ditetapkan. Dengan demikian suatu rencana baru bernasil bila pelaksanaan dari rencana ini dilaksanakan sesuai dengan yang direntjanakan, dimana perlu diadakan suatu rencana dari pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi dari pelaksanaan, time scheduling dari rencana dll.

Djadi pelaksanaan adalah segala usana² yang didjalankan untuk merealisir sesuatu rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Suatu rencana (planning) yang baik belum menjamin bahwa tujuan yang ditetapkan akan berhasil bila pelaksanaannya tidak sempurna. Karena itu dalam melaksanakan sesuatu rencana ini harus diikuti suatu prosedur (tjara) yang diharapkan dapat merealisir yang direntjanakan; dimana umumnya didjalankan tahapan² pelaksanaan.

PELAKSANAAN:

Sebelum sampai pelaksanaan yang konkrit dari suatu rencana harus diadakan dahulu suatu persiapan dari pelaksanaan ini, persiapan mana umumnya dibuat proyek demi proyek yang ada dalam rencana, dalam hal ini rencana proyek yang terdapat dalam rencana pembangunan nasional semesta berentjana.

Tahapan pertama dari persiapan ini ialah mengadakan suatu survey yang meliputi semua bidang yang bersangkutan dengan proyek yang direntjanakan. Survey ini diadakan bertingkat-tingkat dan djuga beberapa kali sebelum kita sampai pada suatu kesimpulan yang baik; yakni survey ekonomi, survey bahan baku, survey bahan pembantu, survey dari sosial overhead yang dibutuhkan, survey untuk menentukan lokasi dan site lokasi dari proyek dll. Dari survey ini diperoleh keterangan apakah suatu proyek itu feasible untuk dibangun atau menguntungkan untuk dibangun.

Setelah survey ini selesai dan hasilnya menunjukkan bahwa proyek ini dapat dibangun maka kemudian diadakan proyek atau plant designing

*) Term Paper” hasil Karya Kolektip Kursus Perentjana-an Pembangunan yang diselenggarakan oleh BAP-PENAS dari tgl. 1-11-1964 sampai 29-12-1964 di Tjipejung.

dimana ditentukan lay out dari plantnja. Baru kemudian dilakukan konstruksi (pembangunan) dari pabrik dan bangunan yang diperlukan oleh proyek; dan bila ini telah selesai kemudian diadakan test terhadap pabrik atau proyek² yang akan diadakan dalam trial operation period dari proyek tsb. Dan akhirnya proyek yang direntjanakan berada dalam operation yang sebenarnya bila test yang diadakan memberi hasil yang memuaskan.

Djadi setjara singkat dapat dikatakan bahwa untuk merealisir suatu proyek pembangunan yang direntjanakan diperlukan:

- pra-construction period untuk survey dan design construction,
- trial operation period,
- akhirnya operation period dimana proyek atau pabrik memproduksi yang telah direntjanakan.

B. PERSOALAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN.

Dalam merealisir proyek² yang telah direntjanakan, kita menghadapi beberapa persoalan yang demi berhasilnya pembangunan tsb. harus segera ditanggulangi sesuai dengan kemampuan kita. Adapun problem² yang kita hadapi ialah:

1. Kekurangan tenaga yang mempunyai tjukup keahlian dalam melaksanakan survey, designing proyek, construction proyek yang ditepatkan.
Didalam pembangunan proyek kita hadapi dengan persoalan tenaga pelaksana yang sangat scarce seperti tenaga professional, skilled dan semi skilled, tenaga² kasar sebagai pekerdja dalam proses produksi.
2. tanggungjawab serta pengalaman² yang dimiliki pelaksana sering menghambat djalannya proyek² yang diharapkan.
3. koordinasi dan sinkronisasi dari pelaksanaan proyek² yang sedjenis maupun tidak sedjenis menimbulkan kematjetan dalam pelaksanaan. Untuk ini perlu adanya scheduling yang tepat diantara proyek² yang akan dilaksanakan. Ambeg parama-arta sangat penting artinja dimana kesulitan dalam pembiayaan menghendaki adanya sistim prioritas tsb. dalam melaksanakan proyek.

C. BEBERAPA TINDAKAN YANG PERLU DIAMBIL UNTUK MENTJAPAI PELAKSANAAN YANG BAIK.

1. Tenaga Pelaksana.
 - a. Pelaksanaan pembangunan yang telah direntjanakan

ljanakan selain harus konsekwen terhadap rentjana tsb. djuga harus mentjapai efisiensi, menambah tenaga pelaksana dan mempertinggi mutu pelaksana sesuai dengan segi dan sendi pembangunan baik jang bertarap nasional maupun regional. Ini menghendaki adanja faktor² tertentu jang harus diperhatikan antara lain faktor manpower sebagai execution forces jang akan melaksanakan rentjana pembangunan jang telah dibuat. Berbitjara tentang manpower maka peranan pendidikan mendjadi sangat penting bila tidak mau dikatakan menentukan. Bila diingat bahwa sifat pembangunan nasional semesta meliputi segenap kehidupan masyarakat baik materiil (economic development) maupun sosial (social development) maka tenaga operasionil dalam bidang tehnik dan bidang sosial (social workers), merupakan masalah jang tak dapat dipisahkan dengan perentjanaan itu sendiri. Sebagai negara jang sedang berkembang dari masyarakat agraris tradisional ke masyarakat industri modern dimana tenaga ahli jang betul² mampu melaksanakan rentjana pembangunan sangat kurang. Masalah acute dan chronis ini bukan sadja dialami oleh Indonesia akan tetapi djuga oleh negara² lain.

Untuk mentjapai target manpower jang kwanita dan kwalitanja dibutuhkan dalam setiap projek pembangunan adanja scientific manpower survey untuk meng-estimate sifat dan karakteristik mengenai surplus dan kekurangan dalam perbandingan supply dan demand dalam bidang human resources. Untuk ini perlu adanja data statistik tentang :

- djumlah penduduk,
- djumlah penduduk dalam usia kerdja,
- djumlah anak jang sedang bersekolah.
- migrasi penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnja.

Lokasi daripada projek pembangunan didaerah (regional planning) menimbulkan konsekweni perlunja lembaga pendidikan jang ada didaerah tersebut diintegrasikan dengan kebutuhan akan manpower. Untuk ini maka pendidikan didaerah hendaknja mentjerminkan djuga pembangunan daerah jang bersangkutan.

Karena sulitnja pengintegrasian tsb., maka bila hal ini belum mungkin dilaksanakan maka perlu adanja projek pendidikan jang berdjangka pendek jang diselenggarakan oleh lembaga jang bertanggungjawab melaksanakan projek pembangunan tsb.

Mengingat pembangunan semesta tidak boleh berhenti walaupun factor apa sadja jang menghalangi termasuk factor human capital jang dirasakan sangat kurang (tenaga profesional, skilled, semi skilled, tenaga buruh kasar dll.), maka selama tenaga skilled tsb. be-

lum terpenuhi baik dalam bidang survey sampai ke pelaksanaannja oleh tenaga bangsa Indonesia sendiri maka untuk sementara dapat diambil dari luar negeri. Tugas tenaga asing tsb. disamping bekerdja dalam keahlianja masing² djuga diharuskan melatih dan mendidik tenaga² Indonesia agar supaja kepergian tenaga asing tsb. dapat segera terisi. Djuga pembinaan kader pembangunan diantara ahli² bangsa Indonesia perlu sekali setjara intensip dilaksanakan. Proses ini dapatlah kita namakan sambil membangun kita beladjar.

- e. Untuk mentjapai tenaga kerdja (manpower) jang dibutuhkan haruslah ada manpower programming disamping manpower budgeting jang disinkronisir dalam manpower planning. Dalam melaksanakan hal ini perlu adanja two way traffic antara development planning dengan manpower planning. Pembangunan ekonomi dan materiil disuatu pihak dengan pembangunan sosial dan mental dilain pihak tidak boien dipisah-pisahkan dan kedua unsur tersebut harus dipandang sebagai dwitunggal.

- f. Bagi developing countries didalam mentjapai target manpower jang dibutuhkan perlu adanja badan atau organisasi jang mampu mengkoordinir lembaga pendidikan disatu pihak dengan lembaga perentjanaan dilain pihak. Dengan adanja Bappenas cq Panitia Negara Urusan Perentjanaan Tenaga Pembangunan (Peraturan Presiden No. 11 tn. 1964) djanganlah terbatas pada mengkoordinasikan lembaga² pendidikan formil tapi djuga pembinaan kader diluar lembaga pendidikan formil jang dalam hal ini kami sebut kader masyarakat atau djenisnja kader pembangunan masyarakat seperti :

— mobilisasi disguised unemployment jang banjak kita dapati didaerah rural kearah kegiatan jang konstruktif seperti pembuatan saluran air, pembuatan gedung² sekolah dengan setjara gotong-rojong. Pentingnja gotong-rojong selalu disebut² dan untuk memobilisasikannja perlu adanja kerdja sama jang erat antara Bappenas dengan Departemen Pembangunan Masyarakat Desa.

Untuk dikota-kota besar mobilisasi tenaga tsb. menghendaki adanja kerdjasama jang erat antara Bappenas dengan Front Nasional.

- Membentuk public opinion tentang pembangunan semesta dikalangan segenap lapisan masyarakat agar terdapat cogesi sosial value system jang senafas dan seragam dikalangan masyarakat bila menghendaki adanja social support dari bangsa Indone-

sia. Public opinion jang mempunjai keajaiban bahwa soal Pembangunan Semesta adalah soal segenap rakyat dan bangsa Indonesia dan harus dihadapi dengan berkerdja sama, dengan demikian maka sifat apatis dan sinis dari beberapa golongan masyarakat dapat dihilangkan. Hal ini penting untuk membina militansi, semangat serta optimisme jang se-besar²nja di dalam menghadapi tantangan² jang timbul.

- g. Lembaga pendidikan baik tinggi, menengah, rendah dan kursus² jang diselenggarakan oleh Pemerintah harus bersifat investasi.

Mengingat investasi dalam pendidikan makan waktu dan biaya jang lama dan banjak maka sambil menunggu atau mengisi gestation lagi tsb. perlu kiranya diadakan vocational dan tehcnical sebagai lembaga jang menilai dan mengawasi rentjana² jang didjalankan oleh masing² departemen. Djadi didalam meng-supply tenaga pelaksana pembangunan maka departemen jang disertai sektoral harus pula aktif membina tenaga² pelaksana dengan djalan :

— Institutional training.

Tjara jang penting dalam menambah tenaga² kerdja (manpower) baik didalam bidang djasa² maupun tehnik dalam industri², pertukangan² dll. Usaha ini harus merupakan suatu kegiatan jang integral dengan sistim pendidikan jang dianut oleh negara. Untuk ini diperlukan adanya perumusan² jang tepat tentang fungsi, peranan dan kedudukan dari peladjar² segera setelah selesai pendidikannya. Pendidikan atau latihan ini harus betul² diarahkan pada kebutuhan nasional maupun regional dalam rangka pembangunan semesta.

Organisasi dalam pelaksanaan Institutional training dapat berbeda satu dengan jang lain sesuai dengan kebutuhan setempat dan sewaktu.

— Apprenticeship training.

Suatu tjara dari instansi baik pemerintah maupun swasta untuk memobilisir tenaga² muda untuk dididik atau dilatih dalam djangka waktu tertentu agar setelah selesai dari latihan dapat segera dikerdjakan. Untuk Indonesia sebaiknya lebih menitik beratkan pada tehcnical know how. Hal ini kami kemukakan karena banjknja orang jang lebih suka memakai pendidikan umum dapat bekerdja dalam bidang djasa². Hal ini disebabkan adanya attitude kerdja bahwa kerdja dalam bidang djasa lebih dirasakan favourable, sedangkan dalam merealisir PNSB kita membutuhkan pekerdja² dalam bidang tehnik.

— On the job training.

Dapat bersifat in-service jaitu latihan bagi tenaga² pelaksana jang sudah ada untuk memperoleh keahlian jang lebih khusus dalam bidang² djasa pertanian, industri dan keradjinan tangan, kesehatan, kesjahteraan sosial dll.

Disamping dapat bersifat Pre-service jaitu latihan bagi tjalon² tenaga kerdja. Sifat dari latihan ini adalah sambil belajar, djuga bekerdja.

— Upgrading training.

Adalah usaha untuk menambah pengetahuan, keahlian dan ketjakaan diantara pelaksana² jang ada jang sedikit banjak telah mendapat dasar² pengetahuan tertentu. Upgrading ini disesuaikan dengan kebutuhan berhubung dengan perluasan usaha² baik dalam bidang industri, pertanian maupun dibidang djasa. Upgrading ini dapat dilaksanakan melalui :

- usaha instansi masing² untuk mempertinggi mutu kerdja dari pada pedjabat menengah dan rendah.
- tugas beladjar pada perguruan tinggi untuk mempertinggi mutu profesional pedjabat-pedjabat tinggi.

— Accelerated training.

Perlu untuk memperoleh tenaga² dalam :

- artisan jaitu tenaga² jang berkualitas untuk membuat barang keradjinan jang mengandung seni.

- pertukangan.
- pekerdjaan dalam proses produksi.

Didalam usaha PNSB dimana ambeg p... ma arta memegang peranan jang penting accelerated training ini perlu mendapat perhatian, terutama bila diingat bahwa usaha² tsb. umumnya dilaksanakan di daerah dalam rangka regional planning development.

Dan tenaga daerah jang memadai didalam hal tersebut dirasakan sangat kurang, dalam memenuhi kebutuhan jang meluas sak maupun dalam rangka kader vork

— Supervisor training.

Pendidikan ini penting sebab dalam rangka negara² jang sedang berkembang p... nannya mendjadi bertambah penting mengingat kenyataan bahwa tenaga pers... lia pengawasan sangat kurang dirasakan mengingat dalam pembangunan men... industri biasa dibutuhkan keahlian dan hubungan kerdja, latihan² kerdja, lati

kerdja metode kerdja dsb. dimana petugas² jang mampu melaksanakan hal tsb. sangat terbatas adanja.

— Management development.

Usaha pendidikan untuk memperoleh tenaga jang mengetahui hal² tentang perentjanaan, koordinasi dan pengawasan baik dalam bidang djasa maupun teknik. Kebutuhan akan ini tampak dengan adanja apa jang dinamakan under employment didalam instansi pemerintah, dimana banjak personalia tapi tidak djelas apa jang mereka kerdjakan. Keadaan ini akan menimbulkan efek-efek pembuangan waktu dan tenaga sadja. Dengan tjukup tenaga management maka dapat diharapkan rentjana² jang telah dibuat dapat dilaksanakan lebih tepat, lebih tjepat, dan lebih efisien dengan djalan penempatan the right man on the right place.

Dengan adanja gejala² dimana banjak instansi² baik pemerintah maupun swasta mendjalankan usaha² pendidikan untuk kepentingan djawatannya masing² maka kami menghawatirkan adanja gejala apa jang kami namakan educated unemployment dikalangan mereka jang baru keluar dari sekolah² sebab daja hisap dari masyarakat (demand) akan tenaga² tsb. menjadi terbatas sifatnja. Bila phenomena ini mulai tampak hendaknya Bappenas bekerdja sama dengan Departemen² PDK, PTIP dan Perburuhan, untuk ber-sama menjalarkan educated unemployment tsb. ke-projek² pembangunan daerah dimana demand akan tenaga tsb. sangat dirasakan.

Keseluruhan Vocational Training tsb. harus disynchronisir dengan rentjana pembangunan semesta baik djangka pendek, medium maupun pandjang, agar vocational training tsb. dapat diarahkan pada kebutuhan dalam social economic development.

Bagi peladjar² jang karena sesuatu hal tidak beruntung untuk melanjutkan pendidikannya perlu diadakan kelas² masyarakat dimana mereka diberi pendidikan dan latihan sekedar sebagai bekal mulai bekerdja dimasyarakat.

Dan hendaknya bekal jang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan daerah setempat.

Hal ini sedikit banjak mentjegah arus pemin-dahan penduduk ke-kota² (urbanisasi). Disini berlaku prinsip pendidikan, 'bring the society to the school and the school to the society'.

Tanggungjawab dan pengalaman.

Untuk mengisi tenaga² jang bertanggungjawab, disamping keahlian tehnik dan pengala-

man, maka tenaga jang bersangkutan harus pula memiliki mental dan moral jang baik. Khusus untuk tenaga² jang menduduki commanding position, diperlukan watak jang kuat, djudjur, berdisiplin, adil, tegas dan bidjaksana.

Tidak adanja sifat² tsb. dalam diri seorang pemimpin, bisa menyebabkan segala dan peraturan menjadi tidak banjak berarti. Karena itu maka perlu didjalankan tindakan² persiapan mental dengan tjara umpamanya indoktrinasi dan vocational training, disamping pendidikan moral jang tidak hanya mengenal sanksi materiil/duniawi, tapi djuga sanksi bathin berupa kejakinan akan adanja pengawasan Tuhan J.M.E. Indoktrinasi dan vocational training tentang mental dan moral ini perlu d.djalakan terus-menerus setjara periodik sesuai dengan pasang surutnja gelombang keadaan jang dapat mempengaruhi djiwa dan f.kiran setiap petugas, terutama para pemegang commanding position itu. Pengalaman dari seseorang petugas, sering kali menjadi faktor jang menentukan berhasil atau tidaknja sesuatu petugas pelaksanaan. Sudah barang tentu dengan pengalaman sadja tidak tjukup, karena itu maka disamping pengalaman djuga perlu pengetahuan atau teori. Kalau perlu, seorang tua jang berpengalaman didampingi oleh seorang pemuda ahli teori atas dasar saling harga menghargai.

Bagi pemuda itu sendiri kerdjasama itu merupakan pula job training jang sangat besar manfaatnja bagi pelaksanaan tugasnja untuk masa jang akan datang.

Hal ini semua sesuai dengan ketetapan MPRS No. II/60 bidang Rochani, Agama dan penelitian.

Kiranya perlu ditambahkan bahwa watak jang kuat diperlukan oleh seseorang pemimpin, sebab tugas seseorang pemimpin itu antara lain ialah membentengi diri dan bawahannya dari pengaruh² negatif jang bisa menyebabkan penjelewengan² dalam berbagai bidang pelaksanaan tugas.

Dengan adanja watak jang kuat maka soal² kedjudjuran dan disiplin menjadi lebih mudah dapat diselenggarakan sedang ketiga soal ini merupakan inti daripada arti perentjanaan.

Tidak pula kurang nilainya dari semua itu, ialah sifat adil dan bidjaksana dengan tidak mengurangi ketegasan sikap jang diperlukan, sehingga ketiga sifat ini merupakan dukungan langsung bagi kedudukan seorang pemimpin dan sekaligus menjadi djaminan akan lanjutarnja tugas pelaksanaan pembangunan.

D. KOORDINASI, SINCHRONISASI, AMBEG PARAMAARTA.

1. Koordinasi dan sinchronisasi.

- a. Tidak adanya koordinasi dan sinchronisasi dalam pelaksanaan projek akan menimbulkan kematjetan² dalam pelaksanaannya.
- b. Tudjuan daripada planning akan dapat ditjapai dengan baik apabila dalam pelaksanaan projek itu ditentukan rentjana kerdja formil, batas² tugas, metode kerdja. dengan menetapkan penggolongan pekerjaan atau pembagian pekerjaan yang harus dilaksanakan, menetapkan hubungan antara para petugas disertai tanggung djawab pelaksanaan.
- c. Dengan adanya penetapan rentjana kerdja itu diharapkan agar tudjuan dapat ditjapai dengan efisien, karena goals yang hendak ditjapai telah ditegaskan dalam rentjana kerdja itu. Sehingga tiap pelaksana baik pelaksana tingkat tinggi, menengah, bawahan masing² mempunyai tugas dan tanggung djawab baik sebagai individu maupun setjara kolektip.
- d. Untuk dapat mentjapai goals itu sangat diperlukan koordinasi dan sinchronisasi dalam segala kegiatan pelaksanaan sehingga kegiatan² itu tidak menuju ke desintegrasi, tetapi segala kegiatan itu dapat diintegrasikan kesatu tudjuan yang hendak ditjapai, baik koordinasi antara pusat dan daerah maupun antara daerah. Dan dalam hal ini Bappenas, Baperdep dan Bakopda memegang peranan yang penting.
- e. Dengan koordinasi dan sinchronisasi itu dapat dilakukan keseluruhan objek kegiatan setiara teratur agar dengan demikian dapat ditjapai tudjuan yang direntjanakan itu. Serta diusahakan untuk menjatukan dan mengarahkan seluruh kegiatan kepada satu arah tudjuan.
- f. Pelaksanaan Planning yang dibarengi dengan koordinasi dan sinchronisasi itu akan berdjalan dengan baik, apabila terdjalin kegotong-rojongan kerdja sama yang sebaik-baiknya sehingga dapat ditjapai keseimbangan, keselarasan dalam penjatuan tudjuan.
- g. Koordinasi dan sinchronisasi hanya dapat berdjalan dengan baik apabila terdjalin human relations diantara para petugas pelaksana, dimana para pelaksana itu tertanam moral yang tinggi dan rasa tanggung-djawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

- h. Koordinasi dapat djuga dilakukan dengan djalan komunikasi misalnja berupa instruksi melalui garis tanggung djawab.
- i. Adanja human relations, moral yang tinggi dalam diri para pelaksana perlu dibarengi rasa disiplin, kesadaran akan tanggung djawab sebagai pengemban Amanat Penyerahan Rakjat, baik masing² sebagai setjara orang pelaksana maupun mereka setjara kolektip sehingga dengan demikian terdjalin tanggungdjawab gandeng-renteng. Dengan demikian para pelaksana adalah merupakan the man behind the gun.
- j. Dengan adanya koordinasi dan sinchronisasi yang baik maka dapat dihindarkan adanya kematjetan² dan pengulur-uluran waktu sehingga pelaksanaan planning dapat ditjapai sesuai dengan time schedule yang telah ditentukan.

2. Ambeg Paramaarta.

- a. Dalam pelaksanaan pembangunan harus selalu diperhatikan sjarat² mental dan materiil.
- b. Usaha untuk mentjukupi sjarat materiil diusahakan dengan pengerahan segala funds and forces yang ada didalam masyarakat untuk mensukseskan P.N.S.B.
- c. Adanja kekurangan modal pembangunan terutama modal materiil perlu kita selamatkan berdjawa ambeg paramaarta jaitu wata pandai mendahulukan urusan² yang penting.
- d. Walaupun dalam pelaksanaan pembangunan telah ada koordinasi, sinchronisasi yang baik dan semangat ambeg paramaarta masih diperlukan adanya sosial support dan social control jaitu ikut sertanja seluruh rakyat setjara aktif sebagai pendukung, pelaksana dan pengawas pelaksanaan P.N.S.B.

TEBAKAU TANPA NIKOTIN

Tjara terdjadinja penabungan nikotin dalam tembakau sudah diselidiki oleh sardjana Soviet G. Iljin. Ia pernah melakukan rangkaian pertjobaan-pertjobaan yang menarik dan berhasil meniadakan tembakau yang disetekkan dengan tomat.

Ternyata, dalam daun dan batangnya nikotin itu tidak ada. Kemudian dibuat sebaliknya, tomat yang disetekkan dengan tembakau dan hasilnya dalam buah tomat muntjul nikotin.

Karena nikotin merugikan kesehatan para perokok, maka sekarang ada kesempatan untuk mendapatkan tembakau tanpa nikotin (Antar Spektrum).

IMPOR BARANG-BARANG DENGAN DEVISA PELENGKAP

KEPUTUSAN KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI No. : 103/6/MPLN/SK/65

KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR
NEGERI,

MENIMBANG :

Bahwa perlu mengadakan ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan dari Devisa Pelengkap.

MENINGGAT :

1. Pasal 15 Undang-undang Devisa Tahun 1964;
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1965.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Ketentuan-ketentuan mengenai Pelaksanaan Peraturan Impor Barang-barang dengan Devisa Pelengkap.

Pertama :

Barang-barang yang dapat diimpor dengan Devisa Pelengkap adalah semua barang-barang seperti tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 105/M/SK/64 tanggal 22 April 1964, sebagaimana telah diubah/ditambah, yang tidak dikenakan Bea Masuk 800%, ketjuali barang-barang yang terlampir dalam Surat Keputusan ini.

Barang-barang yang tersebut dalam Daftar V tetap diperlukan idzin.

Kedua :

Barang-barang yang masuk dalam Tarip-Pos 461-I dan 462 dilarang impornja.

Ketiga :

Segala sesuatu akan ditinjau lagi jika kemudian terdapat kekeliruan.

Keempat :

Peraturan Pelaksanaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 10 Mei 1965.

Agar umum mengetahuinja, memerintahkan penempatan Keputusan ini dalam Berita Negara.

Ditetapkan di : D j a k a r t a.

Pada tanggal : 29 Djuni 1965.

**KUASA MENTERI PERDAGANGAN
LUAR NEGERI,**

ttd.

A. JUSUF

(Brig. Djendral T.N.A.)

**LAMPIRAN DARI SURAT KEPUTUSAN KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI
No. 103/6/MPLN/SK/65 TANGGAL 29 DJUNI 1965**

Tarip Pos No. :	Gol. :	Tarip Pos No. :	Gol. :	Tarip Pos No. :	Gol. :	Tarip Pos No. :	Gol. :
5-II	IV	90	IV	217-I-II	IV	333	IV
12-Ib-IIb	IV	94	IV	218	IV	334-I	IV
13	IV	96-I-II	IV	219	IV	342	IV
14	IV	97	IV	221	IV	352-II	IV
16	IV	99	IV	235-I	IV	356-VI-IX-XIII-	
26	IV	101-I-II	IV	237-II	IV	XIV	IV
27	IV	102	IV	244-II	IV	360-VIa, b-VII-	
31	IV	107-I-II	IV	275	IV	IX	IV
34-II	IV	114	IV	276	IV	395	IV
35	IV	115	IV	280	IV	396-I-II	IV
36-II	IV	116	IV	291	IV	397	IV
45	IV	117-IIa	IV	299	IV	398	IV
50-I	IV	118-I-IIa	IV	310	III/IV	399	IV
51	IV	121-II	IV	312-II	IV	401-I-II	IV
55	III	122	IV	321	IV	402	IV
76-II	IV	159-II	IV	322	IV	403	IV
77	IV	187-I-II	IV	323	IV	404	IV
78-I-II	IV	188	IV	326	IV	405	IV
86	IV	215	IV	327	IV	409	IV
87	IV	216	IV	332	IV	411	IV

IMPOR DENGAN ALOKASI DEvisa BAGI PRODUSEN — EKSPOR NASIONAL

Pengumuman BLLD No. 12/Imp/BLLD/65 tgl. 23-6-1965

Menundjuk pada :

Pengumuman Pimpinan L.A.A.P.L.N. No. 72 tgl. 27 Oktober 1964 Bab I ayat 3 dan ayat 4 maka sedjalan dengan procedure impor dengan S.P.P., dengan ini ditetapkan procedure pelaksanaan impor dengan Alokasi Devisa bagi Produsen — Eksportis Nasional sbb. :

1. Pada set Pernyataan Impor (P.I.), oleh jang berkepentingan, setelah diisi lengkap dan diperoleh persetujuan Departemen dimana Produsen-Eksportir bernaung sebagai produsen mengenai djenis barang jang akan diimpor, diadakan kepada Bank, harus ditambahkan 2 (dua) lembar ekstra untuk Biro Lalu Lintas Devisa.
2. Setelah Bank membubuhi Nomor Registrasi, tanggal, tanda-tangan dan tjap Bank pada P.I. tersebut, maka Bank mengirim lembar ke-1, ke-2 dan 2 lembar ekstra kepada BLLD (Impor) setempat dengan Surat Pengantar rangkap 5 (lima), menurut tjontoh terlampir pada Pengumuman BLLD No. 9/Imp/BLLD/65 tgl. 13 Mei 1965, dengan dibubuhi tanda „A.D.” guna memperoleh pengesahan tentang golongan ekonomi barang jang tertjantum pada P.I. tersebut seraja menahan Surat Alokasi Devisa (S.A.D.) jang bersangkutan.
3. Baru setelah Bank menerima kembali P.I. lembar ke-1 dan ke-2 itu dapat importnja direalisasikan.
4. Dalam hal P.I. jbs. ditolak, dapat untuk satu kali

diadakan P.I. baru jang djuga harus disetujui oleh Departemen jbs. dengan melampirkan P.I. lama jang ditolak.

5. Bersama ini diandjurkan kepada jang berkepentingan agar :
 - a. dalam menentukan barang jang hendak diimpor benar² memilih barang² jang termasuk dalam lampiran I, II dan III dari Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 105/M/SK/64 tgl. 22 April 1964 sebagai telah diubah dan ditambah dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 206/M/SK/64 tgl. 8 Djuli 1964 dan No. 61/M/SK/65 tgl. 3 Maret 1965.
 - b. uraian barang pada baris 8 dari P.I. demikian rupa djelas dan lengkapnja sehingga mudah ditentukan ketepatan pengisian baris 9 (djenis barang) dan baris 10 (golongan dan tarif pos) dari P.I. tersebut.
 - c. bilamana perlu melampirkan brochure/tjontoh barang jang bersangkutan.
6. Ketentuan-ketentuan diatas mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1965.

PIMPINAN
BIRO LALU LINTAS DEvisa
DIREKTORIUM,
ttd. ttd.
A.A. Harahap. Martojo Koento

(Sambungan halaman 19).

Tarif Pos No. :	Gol. :	Tarif Pos No. :	Gol. :	Tarif Pos No. :	Gol. :	Tarif Pos No. :	Gol. :
412	IV	675	IV	876-Ib	IV		keper-
416	IV	678	IV	877-III	IV		luan
423	IV	679	IV	878-II	IV		sport/
425-IIa, b	IV	680	IV	879-I	IV		perbu-
426	IV	681	IV	881	IV		ruan).
437	IV	682	IV	888	III/IV	903-II	(hanja IV
449-IV	IV	683	IV	890	III/IV		untuk
458	IV	684	IV	895	III/IV		keper-
476	IV	685	IV	896	IV		luan
500	IV	686	IV	897	IV		sport/
502	IV	687-I-III	IV	898-I-II	IV		perbu-
508	IV	688	IV	899	IV		ruan).
511	IV	775	IV	900-II (hanja	IV	920	IV
515-II	IV	792-II	IV	untuk		922	IV
519-I	IV	809	IV	keper-		923	IV
596	III/IV	810	IV	luan		931-III-IV	IV
614	IV	811	IV	sport/		934	IV
618-II	III/IV	837-II	IV	perbu-		936	IV
672-III-IV-XI-		838-II-III	IV	ruan).		937	IV
	XIII	841-Ia-IIc	IV	901-II (hanja	IV	939	IV
673	IV	875-III	IV	untuk		940	IV

IMPOR BARANG-BARANG DAN DJASA-DJASA UNTUK PROJEK-PROJEK PRODUCTION SHARING

Dengan Pengumuman² Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa No. 1/P.S./BLLD/65 tanggal 23 Maret 1965 dan No. 2/P.S./BLLD/65 tanggal 5 Djuli 1965 telah ditetapkan Ketentuan-ketentuan prosedur impor barang-barang dan djasa-djasa untuk projek-projek yang dibangun dengan Kredit atas dasar Production Sharing.

Dalam pengumuman Biro Lalu Lintas Devisa No. 1/P.S./BLLD/65 tanggal 23 Maret 1965 itu dijelaskan, bahwa berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. Aa/B/2/1965 tertanggal 12 Djanuari 1965, maka Pengumuman Pimpinan L.A.A.P.L.N. No. 35 tertanggal 18 Pebruari 1964 ditjabut.

Dengan demikian, maka prosedur impor barang-barang dan djasa-djasa untuk projek-projek yang dibangun dengan kredit atas dasar production sharing adalah sebagai berikut :

UMUM.

1. Atas permohonan peserta Indonesia, maka B.L.L.D. berdasarkan kontrak Production Sharing, yang telah disetujui oleh „Panitya Menteri Urusan Kredit Luar Negeri atas dasar Production Sharing”, akan mengeluarkan surat izin pemasukan barang² dan djasa² yang diperlukan, dimana akan dinjatakan sjarat² impor dan djasa² yang harus dipenuhi oleh sipemohon, termasuk sjarat pemeriksaan harga oleh B.L.L.D. Devisa Impor.
2. Pelaksanaan izin impor barang² dan djasa² dalam rangka kredit atas production Sharing dipusatkan pada Bank Indonesia Djakarta.
3. Bank Indonesia akan menata-usahakan utang-piutang dalam valuta asing.

PROSEDUR IMPOR.

1. Untuk pemasukan barang² seperti dimaksud dalam Bab I diatas, peserta Indonesia mengajukan Purchase Order kepada Panitya Tehnis Production Sharing untuk kemudian diteruskan kepada B.L.L.D. Devisa Impor untuk diteliti kesesuaiannya dengan daftar barang² yang terlampir pada kontrak tersebut dalam Bab I sub I diatas dan dipenuhinja sjarat² yang tertjantum dalam surat izin B.L.L.D. termaksud pada Bab I sub I diatas.
Apabila Purchase Order ini dapat disetujui oleh BLLD, maka kemudian melalui Bank Indonesia Djakarta Purchase Order diteruskan kepada peserta luar negeri.
2. Invoice, dokumen² pengapalan barang² serta dokumen² lainnya oleh peserta luar negeri dikirimkan melalui banknja kepada Bank Indonesia Djakarta.

3. Bank Indonesia Djakarta membubuhi stempel P.S. (= Production Sharing) pada dokumen² tersebut dan kemudian menjerahkannya kepada peserta Indonesia tanpa perhitungan dalam valuta rupiah karena utang-piutang ditata-usahakan dalam valuta asing.
4. Berdasarkan dokumen pengapalan yang diterima, Bank Indonesia Djakarta membuat K.P.P. Tetap untuk Peserta Indonesia seperti dimaksud dalam H.P.P.D. pasal 2, 4, 1.
Oleh Bank Indonesia Djakarta K.P.P. Tetap tersebut akan diberi tanda P.S.
5. a. Dalam keadaan dimana letak pelabuhan tujuan/pembongkaran djauh dari Djakarta, maka pada waktu barang² tiba ditempat pembongkaran peserta Indonesia dapat meminta kepada Bank Indonesia setempat untuk dibuatkan K.P.P. Barang yang dibubuhi tanda P.S. berdasarkan tembusan dokumen² pengapalan yang diterima oleh Peserta Indonesia setjara langsung dari luar negeri. K.P.P. barang tersebut diperlakukan oleh Bea & Tjukai seperti yang sudah ditetapkan dalam H.P.P.D. pasal 2, 4, 2.
b. Selandjutnja K.P.P. Tetap yang dibubuhi tanda P.S., selesaknya di buat oleh Bank Indonesia Djakarta, setelah diterimanja dokumen² pengapalan asli yang lengkap beserta perhitungan valuta asing yang bersangkutan.
6. Ketentuan² tersebut dalam sub b 1 sampai sub 5 berlaku pula bagi marketable goods yang telah diizinkan oleh pemerintah untuk diimpor dalam rangka production sharing, dengan tjatatan bahwa :
 - a. harga barang akan ditjatat oleh Bank Indonesia sebagai djumlah yang berhutang dalam valuta asing.
 - b. pemasukan barang² ini tidak dibebaskan dari pungutan Bea Tjukai dan beban² wadajib lain.
 - c. tjara pembajaran pungutan bea tjukai dan beban² wadajib lain ini disesuaikan dengan ketentuan² yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka production sharing.
 - d. djumlah marketable goods yang terhitung ini akan dilunasi bersama-sama dengan pelunasan barang² kepada peserta luar negeri seperti yang ditentukan dalam Pengumuman Biro Lalu Lintas Devisa No. I/EKS/BLLD/65 tanggal 1 Pebruari 1965.

Bersambung ke hal. 23

Menjambut "Hari Bank 1965"

(Pidato Pimpinan Urusan Bank Sentral dimuka Tjorong TVRI tanggal 4 Djuli 1965 diutjapkan oleh Gubernur Pengganti Bank Indonesia, HERTATIJANTO SH).

Hari Bank tahun 1965 adalah Hari Bank jang ke III jang diperingati dan dirajakan oleh seluruh dunia perbankan di Indonesia. Hari Bank untuk pertama kalinya diperingati dan dirajakan pada tanggal 5 Djuli 1963 setelah P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi menetapkan hari lahirnja Bank Negara Indonesia sebagai bank negara pertama jang lahir dalam kariah revolusi jaitu tanggal 5 Djuli 1946, sebagai HARI BANK.

Pada peringatan Hari Bank jang pertama dalam tahun 1963 ini ada 2 peristiwa jang patut kita tjtat dalam sedjarah perbankan Indonesia.

Pertama, pada Hari Bank ke I ini oleh Pimpinan Bank Sentral telah disampaikan kepada P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Konsep R.U.U. Induk Perbankan dan konsep R.U.U. Bank Indonesia jang berisi ketentuan-ketentuan mengenai struktur dan organisasi perbankan jang didasarkan kepada azas-azas ekonomi terpimpin jaitu azas-azas sentralisasi, spesialisasi dan dekonsentrasi. R.U.U.² ini adalah hasil perumusan sebuah Panitia Negara jang dibentuk dengan keputusan Presiden dalam tahun 1961 dan terdiri dari pedjabat-pedjabat Keuangan, pedjabat-pedjabat perbankan baik Negara maupun Swasta dan anggota-anggota D.P.R.-G.R. jang mewakili berbagai-bagai golongan, dengan tugas untuk meniusun konsep RUU perbankan jang berdasarkan azas-azas ekonomi terpimpin, bersih dari sisa-sisa kolonialisme dan feodalisme. Dan pada waktu menerima penyerahan konsep RUU² tersebut Presiden telah menginstruksikan agar RUU² tersebut dapat dikeluarkan sebagai Undang-Undang dalam tahun itu djuga.

Kedua, peristiwa jang patut kita tjtat ialah bahwa pada kesempatan itu pula oleh P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi menggariskan perlunya ada SATU KOMANDO dibidang perbankan.

Latar belakang daripada kedua peristiwa tersebut adalah, bahwa setelah kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dengan Maninol sebagai garis besar haluan Negara, maka sistim, struktur dan organisasi perbankan Indonesia jang berasal dari zaman liberal perlu dirombak dan disesuaikan dengan azas-azas ekonomi terpimpin, sehingga terciptalah suatu sistim moneter dan perbankan jang sesuai dengan alam sosialisme Indonesia.

Waktu berlalu, keadaan berkembang dengan pesatnja sesuai dengan dinamika Revolusi Indonesia. Walaupun usaha penertiban dibidang perbankan

belum dapat diwujudkan melalui ketentuan-ketentuan Undang-Undang baru, namun setjara materi berbagai-bagai usaha penertiban dan perombakan ditempuh oleh pimpinan Bank Sentral dan usaha ini mentjapai klimaksnja jang pertama dengan ditjetuskannia idea Bank Berdjoang oleh J.M. Menteri Urusan Bank Sentral, Bapak Jusuf Muda Dalam suatu idee jang ternjata telah berhasil merombak alam fikiran liberal jang meliputi dunia perbankan di Indonesia dan menimbulkan fikiran-fikiran baru jang menempatkan fungsi bank pada tempatnja jang wajar dalam alam Revolusi INDONESIA.

Dan pada tanggal 5 Djuli 1964 dapatlah masyarakat perbankan Indonesia memperingati dan merajakan Hari Bank jang kedua dengan didjwai oleh semangat BANK BERDJOANG, Bank jang mengintegrasikan diri dengan masyarakat, makro-ekonomi dalam orientasinja, aktif dan dinamis dalam geraknja dan berdjawa pelopor dalam merombak jang usang untuk membangun jang baru. Pada kesempatan ini pula berlangsunglah musjawarah kerda „BANK BERDJOANG SABANG MERAUKE” jang dihadiri oleh pimpinan kantor pusat dan kantor-kantor Tiabang dari semua Bank Negara dan Sabang sampai Merauke dan dimana dimusiawarkan usaha-usaha untuk mengkonkretisasikan idea Bank Berdioang dan usaha-usaha untuk mempersiakan pelaksanaan sistim kredit atas diaminan produksi sebagaimana digariskan oleh P.J.M. Presiden Pemimpin Besar Revolusi dalam Amanat Pembangunan.

Dibawah pandii-pandii Bank Berdioang dirintis usaha-usaha untuk menggerakkan Bank-Bank Pemerintah sebagai alat Revolusi setiara terpimpin. Melalui „gentle persuasion” dipupuklah kesatuan diiwa, kesatuan pikiran dan kesatuan tindak dilancarkan Bank-Bank Pemerintah. Melalui suatu Badan Pertimbangan Menteri Urusan Bank Sentral ia dibentuk dalam bulan April 1964 dan terdiri dari pembantu-pembantu Menteri Urusan Bank Sentral dan para Presiden Direktur Bank-Bank Negara. ikut-sertakanlah pimpinan Bank-Bank Pemerintah dalam perumusan-perumusan kebidaksanaan.

Pemunculan kesatuan diiwa, kesatuan fikiran dan kesatuan tindak dikalangan Bank-Bank Pemerintah meningkat setingkat lagi waktu dalam bulan Agus 1964 dibentuk Badan Pembantu Menteri Urusan Bank Sentral, dimana tidak hania para Presiden Direktur, melainkan seluruh anggota Direksi Bank-Bank Pemerintah diikuti-sertakan membantu Menteri dalam melaksanakan kebidaksanaanja.

Perkembangan berikutnya adalah terbentuknya Badan Pembantu Harian Menteri Urusan Bank Sentral, jang merupakan „standing committee” dan Badan Pembantu Menteri Urusan Bank Sentral.

Dan pada akhir tahun 1964 pimpinan Bank Sentral telah mula merintis dimulainya pelaksanaan asas spesialisasi dikalangan Bank-Bank Pemerintah dengan menetapkan Departemen-Departemen yang harus dilayani oleh sesuatu Bank Negara.

Demikianlah serangkaian usaha penertiban dalam lingkungan Bank-Bank Pemerintah yang ditempuh melalui kebidaksanaan Menteri Urusan Bank Sentral sementara penertiban melalui Undang-Undang belum dapat terwujud.

Sementara itu keadaan berkembang dengan penuh dinamik sesuai dengan gerak irama Revolusi. Melalui amanat politiknya di depan Sidang Umum ke III M.P.R.S. P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dalam bulan April tahun ini mengomandokan "Banting Stir" disegala bidang berdasarkan tuntutan asas-azas BERDIKARI dibidang Ekonomi.

Sebagai tanggapan yang spontan atas peristiwa yang sangat penting dalam sedjarah pertumbuhan Revolusi Indonesia ini, maka hampir serentak Bank-Bank Pemerintah mengadakan konperensi kerdja untuk menyesuaikan diri dengan jiwa BANTING STIR dan BERDIKARI. Dalam hubungan ini maka Menteri Urusan Bank Sentral telah menggariskan suatu program kerdja yang terkenal dengan sebutan PANTJA SAKTI BANK BERDJOANG dan yang berpokok kepada :

1. Pelaksanaan Program Ekonomi Perdjangan berdasarkan DEKON, TAVIP dan tingkat perkembangan Revolusi kita;
2. pengintegrasian perdjangan Bank dengan perdjangan masyarakat;
3. meletakkan dasar-dasar yang lebih kokoh untuk kesatuan antara bank-bank Negara;
4. meletakkan dasar-dasar yang lebih kokoh untuk kesatuan antara pimpinan dan organisasi-organisasi pekerdia;
5. pendielmaan politik pendidikan dan kepegawaian yang bersifat demokratis, berjiwa Manipol dan bermutu tinggi.

Kalau dalam bulan Diuni jbl. diundankan Pene-penan Presiden No. 8 Tahun 1965 mengenai peng-integrasian Bank-Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara kedalam Bank Sentral menudju arah terwujudnya Bank Negara yang tunggal, yang pelaksanaannya dipelonori dengan penginte-grasian B.K.T.N. kedalam Bank Indonesia berda-raskan PENPRES No. 9 Tahun 1965. maka peris-wa ini tidaklah mendedjutkan bagi dunia perbankan

negara, karena pengintegrasian ini adalah sekedar landjutan daripada proses kesatuan yang telah ter-pupuk dengan baiknja diantara bank-bank negara selama ini.

Dengan adanya pengintegrasian ini diharapkan, semua perbankan dapat lebih dimanfaatkan sebagai salah satu alat dalam melaksanakan sistim ekonomi dan keuangan terpimpin.

Dengan adanya struktur perbankan yang tunggal, dapatlah dilakukan penjajaran, pengawasan dan penggunaan dana-dana setjara efisien. Dengan struktur perbankan yang tunggal dapat lebih mudah didialankan usaha "pooling", seleksi dan penjebaran ahli-ahli perbankan untuk memperluas diariangan per-bankan, untuk mengatur sistim pembaiaran dan lalu lintas uang yang lebih terpimpin dan terorganisasi.

Azas-azas yang dipakai dalam menjusun struktur perbankan Indonesia dalam rangka integrasi ini adalah azas-azas yang dirumuskan oleh Panitia Negara Perbankan jaitu :

1. sentralisasi dalam komando dan kebidaksanaan;
2. spesialisasi dalam melajani sektor-sektor ekonomi dalam masyarakat.
3. dekonsentrasi dalam management.

Dan integrasi ini haruslah mentjapai keadaan, dimana bank-bank tidak hania setjara administratif dan organisatoris saja menjadi satu, melainkan terutama ialah pengintegrasian setjara mental dari segenap petugas-petugasnja, mulai dari pimpinan tertinggi sampai yang paling rendah, sehingga tudu-an yang ingin ditjapai jaitu terlaksananya kebidia-k-sanaan Pemerintah dibidang Moneter dan Perbankan setjara efisien, efektif dan terpimpin dapat benar-benar menjadi kenyataan demi pelaksanaan Program Ekonomi Perdjangan.

Kami iakin, bahwa integrasi ini akan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan sukses, meng-ingat adanya kesatuan mental, adanya arah per-djoangan sebagai alat revolusi dan adanya pimpinan yang biddaksana dari P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Dengan demikian, perbankan Indonesia akan tetap mampu berdjangan bersama-sama dengan alat-alat Revolusi lainnya dan dengan masyarakat seluruhnya menyelesaikan revo-lusi untuk mentjapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pantia-Sila.

Dalam suasana yang demikian inilah kita mem-peringati dan merajakan HARI BANK tahun ini.

Sambungan halaman 21

I. PROSEDUR DJASA-DJASA.

1. Invoice djasa-djasa yang bersangkutan oleh peserta luar negeri dikirimkan melalui Bank Indonesia Diakarta.
2. Bank Indonesia Djakarta membubuhi stempel P.S. (= Production Sharing) atas invoice tersebut dengan mentjatat djumlah yang terbutang dan kemudian menjerahkannya

kepada peserta Indonesia tanpa perhitungan dalam rupiah karena utang-piutang ditata-usahkan dalam valuta asing.

3. Diumlah djasa² yang terhutang ini akan dilunasi bersama-sama dengan pelunasan barang² kepada peserta luar negeri, seperti yang ditentukan dalam Pengumuman Biro Lalu Lintas Devisa No. 1/EKS/BLLD/65 tanggal 1 Februari 1965.

ORGANISASI DAN SUSUNAN DIREKTORAT HUBUNGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

KEPUTUSAN
KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR
NEGERI No. 023/4/MPLN/SK/65 TAHUN 1965

KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR
NEGERI,

BAB III.

Pasal 4.

MENIMBANG :

1. bahwa dengan Surat Keputusan Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri No. 001/3/MPLN/SK/65 tanggal 15 Maret 1965 telah ditetapkan organisasi dan susunan dari Urusan Perdagangan Luar Negeri;
2. bahwa dalam Surat Keputusan tersebut telah ditetapkan pula fungsi dan kegiatan² dari Direktorat Hubungan Perdagangan Luar Negeri;
3. bahwa susunan dan tugas dari Bagian-bagian dan Seksi-seksi Direktorat Hubungan Perdagangan Luar Negeri perlu ditetapkan.

MENINGAT :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 40 tahun 1965 tanggal 10 Pebruari 1965;
2. Surat Keputusan Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri No. 001/3/MPLN/SK/65 tanggal 15 Maret 1965.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Organisasi dan Susunan Direktorat Hubungan Perdagangan Luar Negeri, sebagai berikut :

BAB I.

Pasal 1.

KEDUDUKAN

Direktorat Hubungan Perdagangan Luar Negeri merupakan bagian dari Urusan Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 2.

TUGAS POKOK

Mengatur dan mengawasi kelantjaran pelaksanaan kebidjaksanaan dibidang Hubungan Perdagangan Luar Negeri sebagaimana tersebut dalam pasal 8 Surat Keputusan Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri No. 001/3/MPLN/SK/65 tanggal 15 Maret 1965.

BAB II.

Pasal 3.

ORGANISASI DAN SUSUNAN

1. Kepala.
2. Wakil Kepala.
3. Bagian Hubungan Perdagangan Antar Negara
4. Bagian Kerdja-Sama Antar Negara.
5. Bagian Umum/Tata Usaha.

FUNGSI DAN KEGIATAN

- 1.a. Kepala memimpin, mengatur mengawasi Bagian²/Seksi² demi kelantjaran pelaksanaan tugas Direktorat Hubungan Perdagangan Luar Negeri pada umumnya.
- b. Kepala ditetapkan dan diangkat oleh Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri.
- 2.a. Wakil Kepala, mewakili Kepala bila berhalangan untuk melakukan tugasnja.
- b. Wakil Kepala ditetapkan oleh Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri atas usul Kepala Direktorat Hubungan Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 5.

Bagian Hubungan Perdagangan Antar Negara bertanggung djawab atas kelantjaran pelaksanaan urusan hubungan antar negara pada umumnya.

Kegiatan² antara lain :

- a. Menganalisa dan memberikan pendapat mengenai hal² dalam lingkungan pekerdjaan, terutama mengenai persoalan² aktuil jg menjangkut perdagangan (barang²) ekspor/impor Indonesia terpenting berkenaan dengan keadaan yang ditimbulkan oleh politik perdagangan sesuatu atau sekelompok negara/atau oleh politik badan² partikulir yang berpengaruh besar atas perdagangan umumnya dan perdagangan Indonesia chususnja mengingat adanya perkembangan masyarakat ekonomi umumnya dan perindustrian serta perdagangan chususnja di negara² asing.
- b. Mengikuti politik perdagangan negara² asing serta tindakan² insidental, jang dapat menguntungkan atau merugikan Indonesia, sehingga Pemerintah dapat mengambil langkah² jang tepat.
- c. Menjiapkan usul² untuk perdjandjian perdagangan dengan negara² lain dan menjelenggarakan perundingan-perundingan perdagangan.
- d. Menjelenggarakan perantaraan dagang antara perusahaan dalam negeri dengan luar negeri serta sebaliknya.
- e. Mengusulkan garis kebidjaksanaan delegasi Pemerintah Kekonperensi perdagangan antar negara.
- f. Turut serta dalam rapat² mengenai materi sesuai dengan tugas Bagian Hubungan Perdagangan Antar Negara.
- g. Soal² chusus lainnja dari Negara² bersangkutan.

Pasal 6.

Bagian Kerdja-Sama Antar Negara bertanggung djawab atas kelantjaran pelaksanaan kebidjaksanaan kerdja-sama antar negara pada umumnja, chususnja mengenai kerdja-sama antar negara jang menjangkut perdagangan antara negara.

Kegiatan⁹ antara lain :

- I. a. Mengikuti, membahas/menganalisa perkembangan perdagangan internasional pada umumnja dalam hubungan terhadap kepentingan perdagangan dan pembangunan ekonomi Indonesia.
 - b. Mengikuti, membahas/menganalisa kegiatan² badan ekonomi internasional serta blok² ekonomi dalam bidang perdagangan internasional dan akibat/pengaruhnja terhadap kepentingan perdagangan dan pembangunan ekonomi Indonesia.
 - c. Menjelidiki, membahas/menganalisa tindakan² Pemerintah Negara² lain terutama dalam bidang politik komersiil (seperti restriksi, kwantitatip/kwalitatip impor/ekspor, subsidi, tindakan-tindakan diskriminasi dsb.), dan djuga dalam bidang moneter dan sebagainya, hal mana sangat berpengaruh terhadap perkembangan perluasan perdagangan internasional Indonesia.
 - d. Mengikuti, mempeladjar/menganalisa peraturan² Pemerintah terutama dalam bidang ekspor/impor dan hal² jang mempunyai arti penting buat perkembangan perluasan perdagangan internasional Indonesia.
 - e. Menjiapkan, mengolah masak bahan² konkrit serta turut memperdjuangkan dalam forum internasional pada konperensi² badan² internasional seperti G.A.T.T., Conefo Afro Asia serta perdjandjian multilateral lainnja, chususnja dibidang kerdja-sama perdagangan internasional antar Nefo.
 - f. Memberi pertimbangan kepada Menteri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri dalam menetapkan politik perdagangan Luar Negeri.
- II. 1. Mengikuti dengan seksama perkembangan kerdja-sama internasional berbagai commodities, diantaranya :
 - a. Mengusulkan matjam dan djumlah barang² jang akan diperdagangkan dibawah suatu perdjandjian perdagangan.
 - b. Mengusulkan isi materie suatu Commodity Agreement.
 - c. Turut serta memperdjuangkan kepentingan commodities Indonesia dalam konperensi² internasional.
 - d. Mengumpulkan, mengikuti dan mempeladjar peraturan² mengenai kerdja-sama internasional dalam commodities.

2. Mengumpulkan bahan² dan memberikan saran² kepada Pimpinan Direktorat mengenai kebidjaksanaan dalam berbagai import/export commodities, baik jang sudah dan memberi pertimbangan kepada Menteri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri dalam menetapkan ikut tidaknja Indonesia dalam International Commodity Agreement.

- III. 1. Mengumpulkan, menganalisa dan menjabarkan keterangan² mengenai negara²/daerah² perdagangan seluruh dunia dan mengikuti perkembangan perdagangan antar negara.
2. Mengawasi pelaksanaan perdjandjian² perdagangan antar Indonesia dengan negara² lain.
3. Mengawasi Perwakilan Perusahaan Asing di Indonesia, memberikan idzin pembukaan kantor tjabang perusahaan Indonesia diluar negeri, memberikan idzin visa, mengikuti dan mengawasi perkembangan joint operation (joint venture d.l.l.) dengan luar negeri.
4. Membantu menjusun neratja pembajaran/perdagangan Indonesia dengan luar negeri, membuat ichtisar penggunaan bantuan kredit luar negeri dan projek² jang dibiainja.
5. Mengumpulkan dan menjusun data² statistik perdagangan luar negeri; memberikan pertimbangan dalam menentukan ratio/ekspor dengan negara kreditur.
6. Memberikan usul/saran kepada Menteri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri dalam rangka memperlantjar export drive.

Pasal 7.

Bagian Tata Usaha bertanggung djawab atas kelantjaran pekerdjaan administrasi Direktorat sehari-hari.

Kegiatan⁹ antara lain :

1. Pelaksanaan Urusan⁹ Tata Usaha Direktorat
 - a. Mengurus hal² mengenai kepegawaian.
 - b. Mengurus hal² mengenai keuangan.
 - c. Mengurus hal² mengenai rumah-tangga.
 - d. Mengurus hal² mengenai arsip dan ekspedisi.
2. Menjusun dokumentasi.
3. Mengurus hal mengenai kesedjahteraan pegawai dan pendidikan.

Pasal 8.

1. Tiap² Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian jang ditetapkan oleh Kuasa Menteri Pedagangan Luar Negeri atas usul Kepala Direktorat Hubungan Perdagangan Luar Negeri.
2. Tiap² Bagian terdiri dari Seksi² jang tugasnya ditetapkan oleh Kepala Direktorat atas usul Kepala-kepala Bagian.

Bersambung ke hlm. 1

Rumusan Induk

SISTIM PENDIDIKAN NASIONAL PANTJASILA

(Keputusan Presiden R.I. No. 145 Tahun 1965)

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

menimbang :

- a. bahwa pendidikan merupakan unsur mutlak dalam Nation dan Character building;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden tahun 1964 pasal pertama dari Bagian Kedua, dipandang perlu untuk segera memberi nama dan menetapkan rumusan-induk dari Sistim Pendidikan Nasional;

meningat :

1. Pidato P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia tanggal 17 Agustus 1964;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 224 tahun 1964;
3. Ketetapan MPRS No. VI/MPRS/1965;

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

PARTAMA : Memberi nama Sistim Pendidikan Nasional menjadi **Sistim Pendidikan Nasional Pantjasila**;

KEDUA : **Rumusan-Induk Sistim Pendidikan Nasional Pantjasila adalah sebagai berikut :**

MUKADIMAH.

Bahwasanja dalam rangka menjelesaikan Revolusi sebagai Bangsa jang merdeka dan berdaulat kita merasa bertanggung djawab untuk mentjiptakan dan memiliki suatu Konsepsi Pendidikan Nasional jang visioner, djelas dan tegas ditudjukan kepada jupainja Ketiga Kerangka Tudjuan Revolusi kita. Dalam merealisasikan perasaan tanggung-djawab kita dijakinkan oleh Manipol jang berbunji :

„Persoalan² Pokok Revolusi Indonesia harus dihami oleh tiap warga negara Indonesia sedjak ia bangku sekolah dan apalagi sesudah dewasa. Harus diadakan pendidikan setjara luas, disekolah-sekolah maupun diluar sekolah tentang Persoalan² Pokok Revolusi Indonesia. Rakjat Indonesia harus bersatu pikiran mengenai revolusinja sendiri, karena hanja ka ada persatuan dalam fikiran, rakjat Indonesia pat bersatu dalam kemauan dan dalam tindakan”. Dan selandjutnja dijakinkan oleh Amanat Negara P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi jang berbunji :

„Mengenai masalah pendidikan, saja sudah meminta DPA memberikan nasehatnja jang sesuai dengan alam fikiran saja. Pantjawardhana memang sistim pendidikan jang telah saja restui. Adapun pengchususan² dalam melaksanakan sistim itu, ada pengchususan Pantjawardhana ada pengchususan Islam, ada pengchususan Katolik, ada pengchususan Protestan, ada pengchususan Hindu Bali, ada pengchususan Pantjatjinta dan sebagainja, hal ini memang diperkenankan, asal dasarnja dan isi moralnja Pantjasila-Manipol/Usdek. Tidak pertjuma bahwa lambang kita Bhinneka Tunggal Ika !

Aku ingin bahwa dari-ke-bhinneka-tunggal-ikaan itu lahir idec², konsepsi², kreasi-kreasi jang hebat sehebat²nja, dan lahir pula putra², patriot², sardjana², seniman², sastrawan², ahli², bahkan empu², jang bisa kita banggakan” (TAVIP).

Berdasarkan Amanat PJM Presiden/Pemimpin Besar Revolusi itu, disusunlah suatu Konsepsi Pendidikan Nasional.

Konsepsi ini didasarkan pula atas Amanat PJM Presiden/Pemimpin Besar Revolusi, bahwa dasar dan isi-moral Pendidikan Nasional ialah Pantjasila-Manipol/Usdek, jang telah dituangkan kedalam Keputusan Presiden No. 180 tahun 1964 Pendidikan Nasional ialah Pendidikan Bangsa (Nation dan Character building) jang membina suatu bangsa jang mampu atas tanggung-djawab sendiri menjelesaikan Revolusinja, tahap demi tahap, dengan pengertian bahwa agama adalah unsur mutlak dalam rangka Nation dan Character building sesuai dengan Keputusan MPRS tahun 1960.

Pendidikan Nasional Indonesia, ialah pendidikan jang baik materiil maupun spirituil membina manusia dan bangsa Sosialis Indonesia jang berdjawa Pantjasila-Manipol/Usdek sanggup menjelesaikan Ketiga Tudjuan Revolusi Indonesia sesuai dengan Manipol jaitu :

„**Kesatu :** Pembentukan satu Negara Republik Indonesia jang berbentuk Negara Kesatuan dan Negara Kebangsaan, jang demokratis, dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke”.

„**Kedua :** Pembentukan satu masyarakat jang adil dan makmur materiil dan spirituil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu”.

„**Ketiga :** Pembentukan satu persahabatan jang baik antara Republik Indonesia dan semua negara didunia, terutama sekali dengan negara² Asia-Afrika, atas dasar hormat-menghormati satu sama lain dan atas dasar kerdjasama membentuk satu Dunia Baru jang bersih dari imperialisme, menuju kepada Perdamaian Dunia jang sempurna”.

Suatu masalah yang sangat penting yang perlu pula ditengahkan disini ialah fungsi pendidikan Nasional sebagai alat Revolusi. Revolusi Indonesia yang mempunyai Tiga Kerangka Tujuan seperti yang tertantum didalam MANIPOL R.I. dan bergerak dalam abad ke-XX memerlukan pembinaan :

1. Manusia Indonesia Baru yang berjiwa Pantjasila-Manipol/Usdek dan sanggup berdjombang untuk mentjapai tjita² tersebut.
2. Manpower yang tjukup untuk melaksanakan pembangunan.
3. Ilmu dan tehnologi yang tinggi.
4. Pergerakan massa aksinja seluruh kekuatan rakjat dalam pembangunan dan revolusi.

Untuk semuanya itu Pendidikan sebagai bagian yang integral dalam revolusi menjeluruh dan merata dan sebagai landasan utama daripada pembangunan seperti yang ditegaskan dalam Ketetapan MPRS No. II tahun 1960 harus difungsikan sebagai berikut :

1. Pendidikan sebagai pembina Manusia Indonesia Baru, yang berachlak tinggi.
2. Pendidikan sebagai produsen tenaga kerdja dalam semua bidang dan tingkatnja.
3. Pendidikan sebagai lembaga pengembang kebudayaan Nasional.
4. Pendidikan sebagai lembaga pengembang ilmu pengetahuan, teknik dan fisik/mental.
5. Pendidikan sebagai lembaga penggerak seluruh kekuatan rakjat.

Kelima Dharma Bhakti pendidikan dalam segala djenis dan tingkatnja jaitu :

1. Membina Manusia Indonesia Baru yang berachlak tinggi.
2. Memenuhi kebutuhan tenaga kerdja dalam segenap bidang dan tingkatnja.
3. Memajukan dan mengembangkan kebudayaan Nasional.
4. Memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan tehnologi.
5. Menggerakkan dan menjadarkan seluruh kekuatan rakjat untuk membangun Masyarakat dan Manusia Indonesia Baru.

Kelima tugas tersebut tak dipisahkan dari pembangunan olah-raga sebagai alat revolusi untuk membangun manusia Indonesia Baru yang kuat fisik dan mentalnja.

Kelima tugas tersebut ditambah dengan pengembangan olah-raga hendaknja dijadikan dasar program setiap lembaga pendidikan serta dijadikan dasar pula bagi penjusunan tata kerdja dan pembagian kerdja diantara lembaga² pendidikan dan dalam lembaga² pendidikan itu sendiri, dalam mengisi Ketetapan MPRS No. II/MPRS/tahun 1960 Bab II pasal 2.

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan pula Ta sebagai pedoman pelaksanaan Manipol yang mengandung Tri-Sakti :

1. berdaulat dan bebas berpolitik
2. „Berdikari” dibidang ekonomi
3. berkepribadian Nasional dalam bidang kebudayaan. (Amanat P.J.M. Presiden pada hari Pendidikan Nasional 2 Mei 1965).

Djuga dalam Amanat Politik „Berdikari” tanggal 11 April 1965 ditetapkan sebagai berikut

1. Pendidikan sebagai alat Revolusi dalam suasana Berdikari mengharuskan pembantingan stirring segala bidang, chususnja dalam bidang pendidikan.
2. Mempersiapkan Bangsa Indonesia setjara mental dan fisik untuk dengan ichlas memikul tanggung-djawab dalam melaksanakan Ketiga Kerangka Tujuan Revolusi Indonesia.
3. Meninjau kembali dan menjesuaikan Pembangunan Nasional Semesta Berentjangan tuntutan perkembangan Revolusi kita sekarang ini. Dalam pelaksanaan tidak perlu diadakan perubahan dan meninggalkan kepribadian Bangsa Indonesia”.

Dengan penegasan daripada tugas lembaga-pendidikan dalam Revolusi Indonesia maka djelas kedudukan Indonesia dalam keseluruhan slag Revolusi Indonesia yang menghimpun seluruh kekuatan progresif revolusioner berporoskan Nasak. Dengan demikian pula maka tugas pendidikan bersifat macro-pedagogis mendjadi djelas.

DASAR-AZAS PENDIDIKAN NASIONAL

Pantjasila-Manipol/Usdek adalah Moral dan safah hidup Bangsa Indonesia serta merupakan nifestasi persatuan Bangsa dan Wilayah Indonesia demikian pula penghidupan Nasional dan Internasional. Oleh karena itu Dasar/Azas Pendidikan Nasional sebagai landasan bagi semua pelaksanaan pendidikan Nasional adalah PANTJASILA-Manipol/Usdek.

Dengan demikian, Pantjasila-Manipol/Usdek harus mendjiwai semua segi Pendidikan Nasional.

TUDJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

Tudjuan pendidikan Nasional kita baik yang diselenggarakan oleh fihak Pemerintah maupun Swasta, dari Pendidikan Prasekolah sampai pendidikan tinggi, supaya melahirkan warganegara² So Indonesia yang susila, yang bertanggung-djawab terselenggaranja Masyarakat Sosialis Indonesia, dan makmur baik spirituil maupun materiil dan berjiwa Pantjasila jaitu :

- a. Ke-Tuhanan Jang Maha Esa
- b. Perikemanusiaan yang adil dan beradab

c. Kebangsaan
d. Kerakjatan
e. Keadilan Sosial,
seperti dijelaskan dalam Manipol/Usdek.

ISI MORAL PENDIDIKAN NASIONAL

Isi Moral Pendidikan Nasional jang diselenggara-kan oleh Pemerintah maupun Swasta adalah Pantjasila-Manipol/Usdek.

POLITIK PENDIDIKAN NASIONAL

Politik Pendidikan Nasional ialah Manifesto Poli- tik Republik Indonesia beserta pedoman² pelaksana- annja. Oleh karena itu maka garis dan strategi dasar pelaksanaan Pendidikan Nasional-Demokratis harus melahirkan patriot² komplit. Jang berdasarkan Pan- tjasila-Manipol/Usdek, menentang segala bentuk penghisapan manusia atas manusia, bangsa atas bangsa, ialah :

- a. Imperialisme
- b. Kolonialisme dan Neo Kolonialisme
- c. Feodalisme
- d. Kapitalisme

dan jang berdjoang dengan penuh kejakinan untuk membangun suatu Masjarakat Sosialis Indonesia jang adil dan makmur serta membangun Dunia Baru.

PENGCHUSUSAN DALAM SISTIM PENDIDIKAN NASIONAL

Pengchusususan Pendidikan Nasional diperkenankan sesuai dengan „aliran” politik dan kejakinan Agama

MADJELIS PENDIDIKAN NASIONAL DIBENTUK

Dengan Keputusan Presiden R.I. No. 146 tahun 1965, tanggal dan berlaku mulai tanggal 28 Mei 1965 telah dibentuk Madjelis Pendidikan Nasional jang merupakan Badan Tertinggi dalam bidang peren- tjaan, pembinaan dan pengawasan Sistim Pendi- kan Nasional Pantjasila disegala bidang pendidikan. (lihat B.N. No. 1219 hal. 14a).

Presiden R.I./Panglima Tertinggi ABRI/Pemim- pin Besar Revolusi Indonesia ditetapkan sebagai Pengajom Agung Madjelis Pendidikan Nasional ter- sebut dan sebagai Ketua merangkap anggota dari Madjelis Pendidikan Nasional ditetapkan Menteri/ Wakil Ketua II DPA, Ketua Panitia Negara Penjem- purnaan Sistim Pendidikan Pantjawardhana Prof. Sujono Hadinoto SH.

Kepada Ketua Madjelis Pendidikan Nasional di- tugaskan untuk menjusun tugas, wewenang, kedu- dukan, anggaran belandja, komposisi dan personalia daripada Madjelis Pendidikan Nasional itu.

jang dianutnja masing² dalam rangka Pantjasila- Manipol/Usdek sebagai satu kekuatan.

PENJELenggara PENDIDIKAN NASIONAL

Penjelenggara Pendidikan Nasional ialah Negara/ Pemerintah. Lembaga² Keagamaan Lembaga²/ Organisasi² Kemasjarakatan, Orang Tua/Wali Murid, menurut bidang, hak, kewadajiban dan wewenangnja masing², dalam satu ikatan kerdjasama jang harmonis demi tertjapainja tudjuan Pendidikan Nasional.

P E N U T U P

Rumusan-Induk Sistim Pendidikan Nasional Pan- tjasila jang telah disusun seperti tersebut diatas, ha- rus dijadikan titik-tolak dari mana didjabarkan semua segi pelaksanaan baik jang bertalian dengan bentuk maupun isi Pendidikan Nasional, seperti struktur, kurikulum, didaktik, dan metodik Pendi- kan Nasional, dengan memperhatikan adanja masa peralihan.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku mulai hari ditetapkan.

Ditetapkan di: Djakarta
pada tanggal: 28 Mei 1965

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

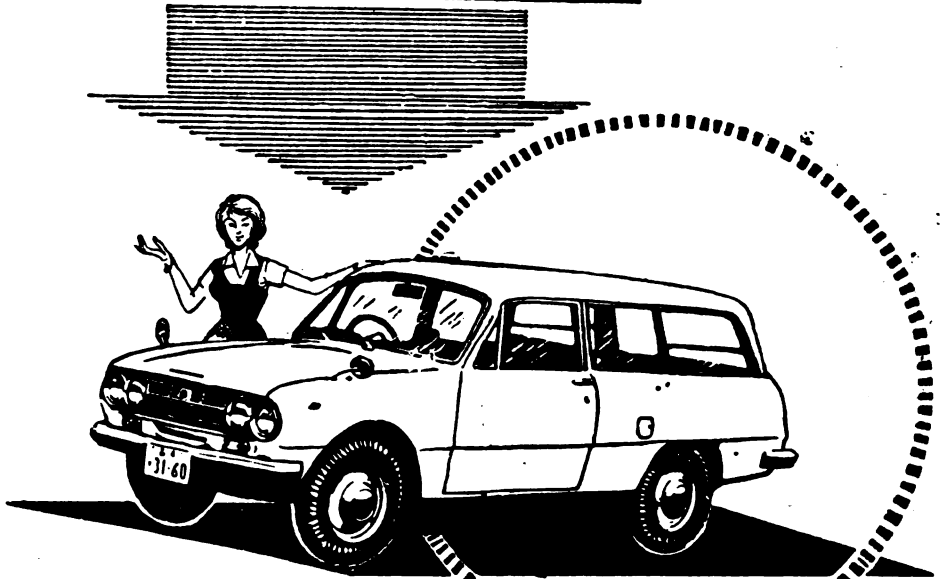
S U K A R N O

PRESIDEN DIREKTUR MENDJADI DIREKTUR UTAMA

Dengan Peraturan Pemerintah No. 27 th. 1965 tertanggal 4-6-'65, jang mempunjai daja surut sampai tanggal 30-4-'65, telah ditetapkan peng- gantian istilah djabatan "Presiden Direktur" mendjadi "Direktur Utama".

Istilah djabatan „Presiden Direktur” sebagai- mana termaktub dalam semua Peraturan Peme- rintah tentang pendirian Perusahaan-Perusahaan Negara jang dibentuk berdasarkan undang² No. 19 tahun 1960 (L.N. th. 1960 No. 59) tentang Peru- sahaan Negara dan semua Perusahaan Negara lainnja jang didasarkan atas Peraturan² Pemerintah tsb. diganti mendjadi „Direktur Utama”.

Terima Indent



ISUZU BELLETT
EXPRESS VAN
GASOLINE 1300CC 58 PS
DIESEL 1800CC 50 PS

Agente tunggal di Indonesia :

PT. PANTJA NIAGA



Kramat Raya 94-96 Djakarta



Varia berita singkat:

Ekonomi/Perdagangan Internasional

1. **Perdagangan etjeran di Uni Sovjet :** Terdapat naджuan pesat dalam pertumbuhan perdagangan eran. Dipentingkan penjesuaian produksi terhadap mintaan/keinginan konsumen. Tahun depan akan ediakkan sedjumlah dana untuk membiajai dan rangsang produksi barang² hasil industri ringan i makanan untuk dapat memperluas assortment i memadjukan kualitas barang. Mulai bulan Djuli un ini diadakan suatu skala penilaian efisiensi i efektivitas daripada perusahaan² niaga ber- arkan dua matjam standard jaitu omset dan laba. ah banjak uang dikeluarkan untuk perbaikan litas², pembangunan gedung²/toko² baru dan ididikan kader.

2. **Pakistan ketjewa :** Kredit pembangunan dari rman Barat merugikan Pakistan. Harga jang harus ajar adalah 40% lebih tinggi andaikata meng- or dari negara² lain.

3. **India menghadapi kesulitan ekonomi :** Kesu- n-kesulitan ekonomi jang dihadapi India pada etu ini dianggap sangat serius, berupa kesulitan i² pembajaran luar negeri dan kekurangan bahan kanaan. Diramalkan, akan muntjul hal² jang tak at dielakkan berupa „Atjaman kemelaratan dan atjauan”.

4. **Mutu karet Indonesia memuaskan :** Mutu et Indonesia jang langsung diekspor ke Amerika ikat dengan meng-by pass Singapura, mendapat ijan dari **”Rubber Trade Association”**, oleh ena lebih baik bila dibandingkan dengan tahun² assed.

5. **Produksi beras sedunia :** Prospek produksi as sedunia untuk musim panen tahun 1965/1966: istan mungkin akan turun karena kerusakan pa- ; Djepang — iklim jang sangat dingin dapat me- bulkan penurunan produksi; Birma — iklimnja guntungan; Mesir; — terdapat perluasan areal anaman; R.R.T. dan Vietnam Utara — sama de- n di Mesir; Indonesia — produksi terus me- gkat. Produksi beras sedunia musim panen 4/1965 mentjapai 169 djuta ton.

6. **Ekspor karet Thailand :** Dalam djangka tu empat bulan pertama tahun ini, Thailand h mengekspor karet sedjumlah 79, 282, 457 kg. ara² pembeli menurut urutan besarnya pem- an adalah : Djepang, „Malaysia”, Inggris, Djer- i Barat, Perantjis, Italia, Amerika Serikat, Tje- owakia, Polandia, Spanjol, Portugis, Norwegia, mark, **Mexiko**, Hongkong dan Junani.

7. **Produksi teh dunia :** Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat, produksi teh dunia tahun 1965 diharapkan sebesar 2.416 djuta lbs., jaitu 21 djuta lebih besar dari pada produksi tahun 1964. Untuk kelangsungan trend kenaikan tersebut diha- rapkan perluasan areal penanaman, penambahan penggunaan pupuk dan penanaman kembali. Walau- pun hal ini merupakan sukses dalam tahun² belakang- an ini, tapi konsumsi dalam negeri produsenpun telah meningkat, disamping meningkatnja konsumsi negara² konsumen, sehingga produksi teh dunia perlu terus diperbesar. Ekspor teh dari sebagian besar negara² produsen, pada tahun 1964 berdjumlah 1.228 djuta lbs. jaitu berupa 2% lebih kurang daripada tahun 1963. Hal ini terutama disebabkan kemun- duran pendjualan jang menjolok dari India dan Indonesia.

8. **Produksi kopi di Brazilia :** Produksi tahun ini diperkirakan sebesar 33 djuta karung, sedangkan quota menurut International Coffee Agreement se- besar 17,5 djuta karung dan konsumsi dalam negeri sebesar 5 djuta karung.

9. **Perdagangan karet alam :** Volume pembelian karet Amerika Serikat dari „Malaysia” menurun dari 69% pada tahun 1963 mendjadi 37% pada tahun 1964 dari pada seluruh pembelian. Sedangkan pem- belian dari Indonesia meningkat dari 31% pada tahun 1963 mendjadi 63% pada tahun 1964; dan pada triwulan pertama tahun 1965 pembelian dari „Malaysia” sebesar 22% sedangkan dari Indonesia 78%. Djuga Djepang telah meningkatkan pembelian karetnja dari Indonesia.

Dalam djangka waktu hanya dua bulan sadja da- lam tahun 1965 ini, Eropah Timur telah membeli karet dari „Malaysia” sebanjak 50.000 ton. Djum- lah ini merupakan kira² 34% dari seluruh djumlah pembelian tahun jang lalu. Menurut besarnya djum- lah pembelian, Uni Sovjet menduduki tempat per- tama, dan disusul berturut² oleh Rumania dan Polandia.

10. **Konsumsi karet sintetis :** Menurut Interna- tional Institute of Synthetic Rubber Producers di Amerika Serikat, dari seluruh penggunaan karet da- lam industri Amerika Serikat, 75% merupakan karet sintetis. Dalam tahun 1955 produksi karet sintetis di Amerika Serikat berdjumlah 970.000 long ton se- dangkan pada tahun 1964 naik mendjadi 1.765.000 long ton.

Bersambung ke hlm. 33

Varia berita singkat:

Ekonomi/Perdagangan Dalam Negeri

1. Pengintegrasian Bank-Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara kedalam Bank Sentral

Dalam rangka usaha menjehatkan dan menertibkan aparatur ekonomi dan pembangunan untuk menjapai efektifita dan efisiensi yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) Ketetapan M.P.R.S. No. VI/MPRS/1965, struktur dan organisasi perbankan disederhanakan kearah suatu struktur dan organisasi perbankan yang bersifat tunggal.

Untuk dapat melajani dengan sebaik-baiknja berbagai sektor ekonomi didalam masyarakat bagi kepentingan produksi, Bank Sentral mengadakan spesialisasi kedalam jang ditudjukan kepada sektor² ekonomi termaksud.

Sebagai langkah pertama kearah terwujudnja struktur dan organisasi perbankan yang bersifat tunggal Bank-Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara diintegrasikan kedalam Bank Sentral menurut tahap-tahap yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan keadaan.

Demikian antara lain ditetapkan dalam Penetapan Presiden R.I. No. 8 Tahun 1965.

Dalam rangka usaha melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka dengan Penetapan Presiden R.I. No. 9 tahun 1965 ditetapkan Pengintegrasian Bank Koperasi Tani dan Nelajan kedalam Bank Indonesia.

Terhitung mulai 1 Djuli 1965 semua Kantor² Bank Koperasi Tani dan Nelajan mendjadi kantor² Bank Indonesia, dengan nama : Bank Indonesia „Urusan Koperasi, Tani dan Nelajan”. (Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No. Kep. 47/UBS/65.

2. Penjerahan Biro Pusat Statistik kepada Menteri Urusan Research Nasional.

Dengan Keputusan Presiden R.I. No. 92 tahun 1965 telah ditetapkan. Penjerahan dan Penempatan Biro Pusat Statistik setjara administratif organisatoris dan taktis operasional dari Perdana Menteri kepada Menteri Urusan Research Nasional. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 1965.

3. Kurs S.P.P.

Kurs ekuasi SPP pada call tanggal 6 Djuli 1965 di Bursa Bank Indonesia terdjadi pada 27, djika dibandingkan minggu sebelumnya kurs SPP telah naik lagi 2 punt.

4. Hasil pajak Negara 90% dari sektor perdagangan.

Pendapatan negara dari pajak untuk 60% tang dari sumber pajak perdagangan setjara langsung dan 30% lainnja dari sektor perdagangan langsung.

5. Pentjabutan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.

Pada dewasa ini pembangunan ekonomi Indonesia serta memperbesar produksi nasional guna meminggi tingkatan penghidupan rakyat ternjata dan dilandjutkan berdasarkan atas prinsip berdiri di kaki sendiri.

Usaha yang telah dilakukan dalam hubungan antara lain ialah memperoleh kredit-kredit dari negeri atas dasar production sharing.

Berhubung dengan itu maka penanaman modal asing di Indonesia tidak diperlukan lagi dan karena itu Undang-Undang No. 78 tahun 1958 jo. Undang-Undang No. 15 Prp. tahun 1960 dapat ditjabut.

Demikianlah pendjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 tentang Pentjabutan Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang mulai berlaku pada tanggal 27 1965.

6. Serah Terima Departemen Urusan P.3 Berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 180 Tahun 1965

Dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden R.I. No. 180 Tahun 1965 khusus mengenai perantaraan susunan Kompartimen Keuangan, maka pada Kamis, tanggal 24 Djuni 1965, dilakukan serah terima setjara keseluruhan tugas wewenang Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan dengan ketentuan-ketentuan khusus sebagai berikut :

1. Kepada :

J.M. Menteri Urusan Bank Sentral — Jusuf Muda Dalam
mengenai :

1. Urusan Kas Negara
2. P.N. Pegadaian dan P.N. Arta
3. Kantor Pusat Pengiriman Uang.

2. Kepada .

J.M. Menteri Urusan Anggaran Negara, Drs Surjadi
mengenai :

1. Urusan Pembiajan Negara termasuk :
 - a. Perbendaharaan Negara
 - b. Depot Pusat Obligasi Negara
 - c. Perjalanan Dinas dalam dan luar negeri
2. Projek Mekanisasi Tata-usaha Keuangan Negara
3. Urusan Pengawasan Keuangan Negara, termasuk Akuntan Negara
4. Akademi Thesauri Negara, Akademi Adjun Akuntan Negara dan Kursus² dibidang Ke-bendaharaan Negara serta Akuntansi.

Kepada :

J.M. Menteri Iuran Negara, Brig. Djen. Polisi

Drs Hugeng Iman Santoso

mengenai :

1. Urusan Pendapatan Negara jang meliputi :
 - a. Pajak,
 - b. Pajak Hasil Bumi,
 - c. Bea dan Tjukai,
 - d. Retribusi,
 - e. Pungutan² lain,
 - f. dan lain penerimaan seperti Dana, Sumbangan dan sebagainya.

2. Harta Kekajaan Negara jang penggunaannya belum diserahkan kepada Departemen jang bersangkutan.
3. Urusan Pendapatan Pemerintah Daerah.
4. Urusan Penagihan Pihutang Negara.
5. Kursus² Pendidikan dibidang perpandjangan dan bea tjukai.
6. d.l.l. jang menjangkut pendapatan Negara.

4. Kepada :

J.M. Menteri Perasuransian,

Sutjipto S. Amidharmo

mengenai :

1. Semua Perusahaan Negara Asuransi dan P.N. Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri);
2. Penguasaan dan pengawasan Perusahaan² Asuransi Asing;
3. Koordinasi, pembinaan dan pengawasan dunia peransuransian.

5. Kepada :

J.M. Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan, Sumarno S.H.

mengenai :

Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara (STIKN).

Sambungan halaman 31.

1. **Australia defisit:** Impor harus segera diurangi, ekspor harus diperbesar. Demikian usul tua Pengusaha Industri Australia. Dalam lima tahun pertama tahun 1964 perdagangan luar negeri mempunyai surplus 192.000.000 pound Australia. Pada bulan Mei 1965 telah dialami defisit sebesar 3.200.000 pound Australia.

2. **Pusat Perdagangan Etjeran Eropah:** Telah dibentuk di Brussel suatu badan jang dinamakan **European Retail Trade Centre**. Tujuannya mewakili kepentingan² perdagangan etjeran sebagai keseluruhan di Eropah terutama dalam hubungannya dengan **Saran Bersama Eropah (EEC)**. Organisasi ini akan menjadi anggota daripada **EEC Confederation of Commercial Organisations**, tapi akan bertindak bebas dalam hal² jang khusus menjangkut persoalan² perdagangan etjeran. Keanggotaannya terdiri dari dua kategori: Komite² Nasional/organisasi² tung-

gal jang mewakili kepentingan² pedagang² etjeran, organisasi² pedagang² etjeran internasional (d.h.i. International Federation of Small and Medium Commercial Enterprises dan International Federation of Large Distribution Enterprises), dan federasi internasional dari pada pedagang² etjeran jang menghususkan diri dalam salah satu bidang barang.

13. **Mesir:** Port Said sedang dipersiapkan dewasa ini untuk membangun Free Trade Zone dalam arti luas. Jaitu disamping didirikannya gudang² dan fasilitas² pelabuhan setjara besar²an tapi djuga akan diadakan peraturan² devisa khusus jang djauh lebih lunak. Dengan tjara demikian diharapkan Free Trade Zone tersebut akan lebih menarik untuk perdagangan internasional.

14. **Etiopia:** 53% dari hasil seluruh ekspor Etiopia terdiri dari Kopi. Sebagian besar diekspor ke Amerika Serikat, kemudian ke Italia, Perantjis dan Djerman Barat.

P. T. K A R K A M

(P.T. KULIT ATJEH RAYA KAPTEN MARKAM)

KANTOR PUSAT : Djl. Pintubesar Selatan 97 atas Djakarta-Kota
Tilpon 23368 - 22644 - 21092
alamat kawat : KARKAM DJAKARTA

KANTOR TJABANG : M E D A N
P e k a n b a r u
D u m a i
R e n g a t
D j a m b i

KANTOR PERWAKILAN : T e m b i l a h a n
B e n g k a l i s
P a l e m b a n g
S i b o l g a

PPN P.T. KARKAM : A e r m o l e k (R i a u)
Perusahaan Remilling P.T. KARKAM : Kampung Lalang Sunggal
(Sumatra Utara)

EXPORTIR : K A R E T
K O P R A
dan hasil perkebunan lainnja

IMPORTIR : BARANG² KEPERLUAN PEMBANGUNAN
KENDARAAN²
MESIN² DIESEL
untuk berbagai matjam keperluan
MESIN² KAPAL

* * *

BANK² KAMI IALAH : BANK INDONESIA
BANK NEGARA INDONESIA
BANK DAGANG NEGARA
BANK KOPERASI TANI & NELAJAN

* * *

** Dalam rangka „banting setir” untuk „berdikari” dibidang ekonomi dan pembangunan,
P.T. KARKAM melaksanakan kegiatan²-nja semata-mata untuk membantu Pemerintah.

** Sembojan kami "MADJU TERUS PANTANG MUNDUR" UNTUK KEMENANGAN
REVOLUSI dan UNTUK TERTJAPAINJA MASJARAKAT SOSIALIS INDONESIA.

Pengumuman - Pengumuman B. L. L. D.

BATAS WAKTU PENDAFTARAN DAN PENJIMPANAN EFEK-EFEK

Pengumuman B.L.L.D. No. 10/Inv/BLLD/1965 tertanggal 26 Djuni 1965

Menunjuk pada pasal 16 Undang² Devisa Tahun 1964 tentang kewadajiban untuk menjimpan pada salah satu Bank Devisa :

a. bagi warga-negara/badan hukum Indonesia untuk :

- a) efek² dalam mata uang lain daripada Rupiah,
- b) efek² jang dikeluarkan oleh badan hukum di Indonesia sebelum 29 Desember 1949.

b. bagi warga-negara/badan hukum asing untuk:

- a) efek² jang berbunji dalam mata uang Rupiah,
- b) efek² jang berbunji dalam mata uang lain dari pada Rupiah sekedar dimiliki sebelum Undang² Devisa Tahun 1964 berlaku, bersama ini diberitahukan sebagai berikut :

I. Batas waktu penjimpanan efek² termaksud jang menurut pasal 16 tersebut diatas harus dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah Undang² Devisa Tahun 1964 berlaku diundurkan hingga akhir September 1965.

II. Kewadajiban tentang pentjataan dan penjimpanan efek² tersebut pada sub A b tidak meliputi :

1. efek² jang dahulu berdasarkan Deviezen Ordonantie 1940 pernah dibebaskan dari kewadajiban penjimpanan oleh De Javasche Bank/LAAPLN.
2. efek² jang tidak mempunyai notering pada Busa di Luar Negeri dan/atau telah dirobah menjadi efek² dalam Rupiah atau telah dikeluarkan duplikat/tambahan modal dalam Rupiah.

Dalam hal ke-ragu²an pemilik saham² jang bersangkutan harus menghubungi B.L.L.D. atau Bank Indonesia.

PIMPINAN

BIRO LALU LINTAS DEvisa
DIREKTORIUM,

ttd.

R.A. KARTADJOEMENA

HUBUNGAN BAJAR-MEMBAJAR DENGAN REPUBLIK RAKJAT TIONGKOK DAN PAKISTAN

Pengumuman BLLD No. : 13/Imp/BLLD/65, tgl. 29-6-1965

Sebagaimana dimaksud sedjak tanggal 1 September 1954 antara Indonesia dengan Republik Rakjat Tiongkok telah diadakan Perdjangjian Pembayaran jang disebut "Clearing".

Demikian pula pada permulaan tahun ini telah diadakan Perdjangjian Pembayaran antara Indonesia dan Pakistan jang serupa.

Sampai kini hubungan bazar-membazar dengan "clearing" ini dapat dilaksanakan melalui semua Bank-Bank Dev.sa dengan tjara jang telah diumumkan oleh L.A.A.P.L.N. dahulu dalam Pengumuman kepada Bank-Bank B No. 560 tanggal 15 September 1954.

Untuk mempermudah penelitiannya, maka mulai tanggal 1 Djuli 1965 semua hubungan bazar-membazar dengan Clearing baik dengan Republik Rakjat Tiongkok maupun dengan Pakistan harus disalurkan melalui Bank Indonesia dengan pengertian bahwa :

Mulai tanggal 1 Djuli 1965 penutupan Kontrak Valuta untuk Impor dari R.R.T. dan Pa-

kistan demikian pula untuk transfer sehubungan dengan djasa² ke negara² tersebut tidak diperbolehkan lagi dilakukan oleh Bank-bank devisa ketjual Bank Indonesia.

2. Mulai tanggal 1 Djuli 1965 penutupan Kontrak Valuta untuk Ekspor ke Negara Republik Rakjat Tiongkok dan Pakistan tidak diperbolehkan lagi dilakukan oleh Bank-bank devisa ketjual Bank Indonesia.
3. Transaksi-transaksi jang sedang berdjalan pada Bank-bank devisa baik mengenai impor, djasa-djasa maupun ekspor dapat terus diselenggarakan oleh Bank jang bersangkutan hingga selesai.—

PIMPINAN

BIRO LALU LINTAS DEvisa
DIREKTORIUM,

ttd.

ttd.

A.A. Harahap.

Martojo Koento.

UANG MUKA UNTUK ONGKOS² KAPAL ASING DI INDONESIA

Pengumuman BLLD no. 9/Inv./BLLD/65 tgl. 23-6-1965.

Dengan menundjuk pada sub. 3 dari Pengumuman BLLD No. 5/Inv./BLLD/65 tanggal 3 April 1965 perihal uang muka (Advance-payment) dalam Valuta Asing, bersama ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Mulai tanggal 1 Djuli 1965 jang akan datang uang muka termaksud harus disetor selambat-lambatnja satu minggu sebelum suatu kapal Asing hendak bongkar/muat di-pelabuhan² Indonesia oleh Maskapai Pelajaran Asing jang bersangkutan (Owner/Principaal) ke-Rekening Valuta Asing a/n General Agent di Indonesia pada salah satu Bank Devisa.
2. Besarnja uang muka jang harus disetor termaksud ditetapkan oleh General Agent sesuai dengan perhitungan berdasarkan pengeluaran² dalam Rupiah dan dalam Valuta Asing jang lazimnja harus dibayar oleh kapal-kapal Asing di Indonesia. Khusus untuk pengeluaran² dalam Rupiah General Agent harus memperhatikan kurs penagihan Rp. 1.000,— = US. \$. 1.— sebagaimana telah ditetapkan pada sub. 2 Pengumuman No. 5/Inv./BLLD/65 tanggal 3 April 1965.
3. Djika djumlah penjetoran jang ditetapkan oleh General Agent tidak dapat disetudjui oleh Owner/Principaal, maka keputusan terachir ditetapkan oleh BIPALINDO.
4. General Agent dapat :
 - a). me-Rupiahkan Valuta Asing jang diterima sebagai uang muka dan
 - b). melakukan pembayaran² dalam Valuta Asing kepada P.N. Pelabuhan atau melalui Sub-Agent-nja kepada P.N. Pelabuhan Daerah sampai maksimum 80% dari uang muka termaksud pada sub. 2 diatas, dengan mengadjukan suatu copy Disbursement Account sementara kepada Bank. Selisihnja dapat diterima dengan mengadjukan Disbursement Account jang telah dise-

tudjui oleh Principaal atau Representative-nja di Indonesia.

5. A). Apabila setelah penyelesaian pembayaran terachir terdjadi saldo, maka djumlah tersebut dapat ditambahkan kepada penjetoran selandjutnja untuk memenuhi djumlah jang ditetapkan untuk kapal-kapal jang berikutnya.
- B). Apabila setelah penyelesaian pembayaran² terachir ternjata bahwa uang muka dalam Valuta Asing jang telah diminta oleh General Agent tidak tjukup, maka kekurangan Valuta Asing itu harus ditagih dari Principaal dan ditransfer ke Indonesia selambat-lambatnja 3 bulan setelah tanggal keberangkatan dari pelabuhan terachir di Indonesia. Berhubung dengan ketentuan² tersebut diatas, maka sub. 4 dari Pengumuman kami No. 5/Inv./BLLD/65 tanggal 3 April 1965 kami tjabut kembali.
- C). Agen-agen diwadajibkan untuk mengirinkan laporan mengenai Advance-payment, Disbursement Account disertai bukti² jang bersangkutan selambat-lambatnja 3 bulan setelah tanggal keberangkatan dari pelabuhan terachir di Indonesia.
6. Kewadajiban untuk menjetor uang muka termaksud diatas tidak berlaku untuk kapal-kapal Asing jang datang untuk bongkar atau jang mengangkut minjak bumi jang Keagenan Umum/General Agent-nja dipegang oleh Perusahaan Minjak di Indonesia, oleh karena untuk Perusahaan² Minjak berlaku ketentuan-ketentuan khusus.

PIMPINAN
BIRO LALU LINTAS DEvisa
DIREKTORIUM

ttd. ttd.

R.A. Kartadjuna A.A. Harah

Sambungan halaman 26.

3. Tiap² Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi jang bertanggung djawab kepada Kepala Bagian masing-masing.
4. Kepala Seksi ditetapkan oleh Pembantu Utama Kuasa Menteri atas usul Kepala Direktorat Hubungan Perdagangan Luar Negeri.

BAB IV.

Pasal 9.

KETENTUAN PERALIHAN PENUTUP

- a. Kepala Direktorat Hubungan Perdagangan Luar Negeri akan mengatur peraturan² dan ketentuan² pelaksanaan selandjutnja dengan sebaik mungkin serta mengadakan segala sesuatunja dengan berpedoman kepada ketentuan² mengenai "tour of duty" dan peremadjan, dengan tjara jang tidak menghalang-halangi pekerdjaan routine.

- b. Hal² jang belum tjukup diatur atau belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih landjut oleh Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri/Kepala Direktorat.

Pasal 10.

Surat Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : D j a k a r t a

Pada tanggal : 22 April 1965

KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR
NEGERI,

ttd.

A. JUSUF

(Brig. Djendral T.N.I.)

C.V. „NAROTAMA”

EXPORTERS, IMPORTERS & GENERAL AGENTS

DJALAN TOKO TIGA 55

TELEPON 21686

DJAKARTA KOTA

Cables : NAROTAMA DJAKARTA

EXPORT:

- * **COPRA**
- * **RUBBER**
- * **PEPPER**
- * **COFFEE**
- * **LUMBER**
- * **NUTMEGS**

IMPORT:

- * **ALL KINDS OF COMMODITIES**

PENETAPAN HARGA PENJERAHAN KARET

Berdasarkan freight dari pelabuhan pengapalan

Instruksi Pimpinan BLLD No. 5 BUD/HP/Instruksi/65 tertanggal 22 Djuni 1965, Kepada semua Tjabang BLLD/Bank-Bank Devisa.

Menundjuk pada pasal 7 Undang-undang No. 32 tahun 1964 serta pendjelasannja, bahwa guna mentjapai target ekspor jang telah ditetapkan bagi masing² daerah dan pula untuk mengurangi penumpukan barang² ekspor di Mainport, Pimpinan BLLD menganggap perlu untuk menetapkan Harga penjerahan Karet sesuai dengan freight jang berbeda-beda dari berbagai outports, dengan menetapkan ketentuan² seperti berikut :

1. Terhitung mulai tanggal 3 Djuli 1965, Penetapan Harga Penjerahan Karet akan disesuaikan dengan freight dari berbagai pelabuhan pengapalan.
2. Mulai tanggal 3 Djuli 1965 Biro Lalu Lintas Devisa Pusat akan mengumumkan Harga Pe-

njerahan Karet jang berlaku untuk Mainports jakni jang pengapalannja dilakukan dari pelabuhan²: Belawan, semua Pelabuhan dipulau Djawa ketjuali Tjilatjap, dan Makassar.

Atas dasar Harga Penjerahan Karet jang diumumkan oleh BLLD Pusat tersebut diatas Tjabang BLLD/Bank Devisa menetapkan Harga Penjerahan Karet jang berlaku untuk pengapalan dari Outports jbs. dengan tjanj *mengurangi* Harga Penjerahan jang diumumkan itu dengan sedjumlah "Freight" per pound dalam US. \$ sen dari masing² Outport menurut daftar "Freight" jang terlampir (lihat halaman 39).

Ketentuan² ini berlaku terhadap ekspor jang K/V-nja ditutup baik di Bank Devisa Pusat maupun di Bank Devisa Daerah.—

— Lampiran pada halaman 39.

PENETAPAN HARGA PENJERAHAN BARANG² EKSPOR GOLONGAN II

NO. 34/HP/65.

BERLAKU DARI TGL. 5 DJULI s/d 17 DJULI 1965.

1. COPAL MALENGKET Per Kwintal.

kwaliteit P.W.S.	Nf.	81,—
kwaliteit M.A.P.	Nf.	69,—
kwaliteit W.S.	Nf.	72,—
kwaliteit W.S. (Batjan)	Nf.	59,—
kwaliteit L.A.S.	Nf.	34,—
kwaliteit M.A.	Nf.	23,—
kwaliteit M.B.	Nf.	9,—

2. COPAL LOBA Per Kwintal.

kwaliteit A	Nf.	79,—
kwaliteit B	Nf.	71,—
kwaliteit C. 1.	Nf.	68,—
kwaliteit C. 2.	Nf.	59,—
kwaliteit D	Nf.	55,—
kwaliteit D.B.B.	Nf.	51,—
kwaliteit E	Nf.	48,—
kwaliteit I	Nf.	43,—
kwaliteit Dust	Nf.	12,—

3. KULIT KERBAU Intermediate Per Kwintal.

berat 8 — 10 kg	DM.	200,—
berat 10 — 13 kg	DM.	204,—
berat 13 — 16 kg	DM.	210,—
berat 16 — 20 kg	DM.	218,—
berat 20 — up	DM.	222,—

4. KULIT KERBAU Second Per Kwintal.

berat 8 — 10 kg	DM.	140,—
berat 10 — 13 kg	DM.	142,—
berat 13 — 16 kg	DM.	147,—
berat 16 — 20 kg	DM.	152,—
berat 20 — up	DM.	155,—

5. KULIT KERBAU Pickers Per Kwintal.

berat 8 — 10 kg	DM.	113,—
berat 10 — 13 kg	DM.	117,—
berat 13 — 16 kg	DM.	123,—
berat 16 — 20 kg	DM.	131,—
berat 20 — up	DM.	139,—

6. KULIT KAMBING Ukuran 70 — 100 cm First Lembar.

berat average 34 kg (per 100 lembar) Br. pence 5,—
berat average 37 kg (per 100 lembar) Br. pence 5,—
berat average 40 kg (per 100 lembar) Br. pence 6,—
berat average 50 kg (per 100 lembar) Br. pence 7,—
berat average 60 kg (per 100 lembar) Br. pence 8,—
berat average 65 kg (per 100 lembar) Br. pence 8,—
berat average 70 kg (per 100 lembar) Br. pence 9,—

7. KULIT KAMBING Ukuran 70 — 100 cm Seconds Lembar.

berat average 34 kg (per 100 lembar) Br. pence 4,—
berat average 37 kg (per 100 lembar) Br. pence 4,—
berat average 40 kg (per 100 lembar) Br. pence 4,—
berat average 50 kg (per 100 lembar) Br. pence 5,—
berat average 60 kg (per 100 lembar) Br. pence 6,—
berat average 65 kg (per 100 lembar) Br. pence 6,—
berat average 70 kg (per 100 lembar) Br. pence 6,—

8. KULIT GIBAS Ukuran 70 — 100 cm First Lembar

berat average 50 kg (per 100 lembar) Br. pence 5,—
berat average 60 kg (per 100 lembar) Br. pence 5,—
berat average 70 kg (per 100 lembar) Br. pence 5,—

9. KULIT GIBAS Ukuran 70 — 100 cm Seconds Lembar.

berat average 50 kg (per 100 lembar) Br. pence 4,—
berat average 60 kg (per 100 lembar) Br. pence 4,—
berat average 70 kg (per 100 lembar) Br. pence 4,—

10. KOPI ROBUSTA Per Kg.

EK. I	DM.	1.15
EK. II	DM.	1.10
EK. III	DM.	1.05
20/25%	DM.	1.03
AP. I	DM.	1.19
AP. II	DM.	1.05
G.B. 10/12%	DM.	1.05
JAVA W.I.B./I	DM.	1.69

Bersambung ke hal

**AFTAR PERBEDAAN FREIGHT DARI MAINPORTS DENGAN FREIGHT DARI OUT-
PORTS JANG MENGEKSPOR K A R E T**

ngurangan Freight per lb. untuk tiap² Outports dalam US. \$. sen.

ENIS KARET	Langsa	Sibolga	P. Baru	Padang	Tg. Pinang	Djambi	Palem- bang	Pangkal Pinang
S.S. I	0,3688	0,7711	0,5906	0,4362	0,8195	0,4702	0,4592	0,5831
S.S. II	0,3688	0,7711	0,5906	0,4362	0,8195	0,4702	0,4592	0,5831
S.S. III	0,7376	0,9023	0,6173	0,8723	0,8640	0,6273	0,6273	0,5583
S.S. IV	0,7376	0,9023	0,6173	0,8723	0,8640	0,6273	0,6273	0,5683
S.S. V	0,7376	0,9023	0,6173	0,8723	0,8640	0,6273	0,6273	0,5683
Crepe I	0,4986	1,0423	0,7998	0,5897	1,1082	0,6357	0,6241	0,7332
Crepe II	0,4986	1,0423	0,7998	0,5897	1,1082	0,6357	0,6241	0,7332
Crepe III	0,9972	1,2193	0,8393	1,1793	1,1680	0,8493	0,8493	0,7593
rown 1 X	0,4975	1,0377	0,7942	0,5878	0,9514	0,6301	0,6111	0,7863
rown 2 X	0,4975	1,0377	0,7942	0,5878	0,9514	0,6301	0,6111	0,7863
rown 3 X	0,9950	1,2115	0,8355	1,1755	1,1656	0,8455	0,8455	0,7655
anket C	0,9026	1,0989	0,7589	1,0689	1,0574	0,7689	0,7689	0,6889
anket D	0,9026	1,0989	0,7589	1,0689	1,0574	0,7689	0,7689	0,6889
milled 3	0,9026	1,0989	0,7589	1,0689	1,0574	0,7689	0,7689	0,6898
milled 4	0,9026	1,0989	0,7589	1,0689	1,0574	0,7689	0,7689	0,6889
utbark	0,9026	1,0989	0,7589	1,0689	1,0574	0,7689	0,7689	0,6889
ttings A	0,3688	0,7711	0,5906	0,4362	0,8195	0,4702	0,4592	0,5831
ttings B	0,3688	0,7711	0,5906	0,4362	0,8195	0,4702	0,4592	0,5831
ttings C	0,7376	0,9023	0,6173	0,8723	0,8640	0,6273	0,6273	0,5683
oked Bl. I	0,9026	1,0989	0,7589	1,0689	1,0574	0,7689	0,7689	0,6889
oked Bl. II	0,9026	1,0989	0,7589	1,0689	1,0574	0,7689	0,7689	0,6889

ENIS KARET	Pandjang	Bandjar- masin	Pontianak	Samarinda	Sambas	Sampit	Balik- papan	Buleleng
S.S. I	0,5174	0,6523	0,6312	0,8355	0,7152	0,6022	0,8071	0,6137
S.S. II	0,5174	0,6523	0,6312	0,8355	0,7152	0,6022	0,8071	0,6137
S.S. III	0,6773	0,6473	0,7823	0,9323	0,8723	0,6463	0,9483	0,6773
S.S. IV	0,6773	0,6473	0,7823	0,9323	0,8723	0,6463	0,9483	0,6773
S.S. V	0,6773	0,6473	0,7823	0,9323	0,8723	0,6463	0,9483	0,6773
Crepe I	0,6694	0,8790	0,8465	1,1265	0,9640	0,8090	1,0915	0,8182
Crepe II	0,6694	0,8790	0,8465	1,1265	0,9640	0,8090	1,0915	0,8182
Crepe III	0,9093	0,8693	1,0493	1,2595	1,1793	0,8693	1,2320	0,8993
rown 1 X	0,6893	0,8734	0,8518	1,1210	0,9643	0,8104	1,0888	0,8482
rown 2 X	0,6893	0,8734	0,8518	1,1210	0,9643	0,8104	1,0888	0,8482
rown 3 X	0,9055	0,8655	1,0555	1,2556	1,1755	0,8655	1,2793	0,9550
anket C	0,8289	0,7889	0,9489	1,1389	1,0589	0,7889	1,1605	0,8289
anket D	0,8289	0,7889	0,9489	1,1389	1,0589	0,7889	1,1605	0,8289
milled 3	0,8289	0,7889	0,9489	1,1389	1,0589	0,7889	1,1605	0,8289
milled 4	0,8289	0,7889	0,9489	1,1389	1,0589	0,7889	1,1605	0,8289
utbark	0,8289	0,7889	0,9489	1,1389	1,0589	0,7889	1,1605	0,8289
ttings A	0,5174	0,6523	0,6312	0,8355	0,7653	0,6022	0,8071	0,6137
ttings B	0,5174	0,6523	0,6312	0,8455	0,7653	0,6022	0,8071	0,6137
ttings C	0,6773	0,6473	0,7823	0,9323	0,9723	0,6463	0,9483	0,6773
oked Bl. I	0,8289	0,7889	0,9489	1,1389	1,0589	0,7889	1,1605	0,8289
oked Bl. II	0,8289	0,7889	0,9489	1,1389	1,0589	0,7889	1,1605	0,8289

Djakarta, 22 Djuni 1965.

(Sambungan dari hal. 38)

- | | |
|--|--|
| <p>11. KOPI ARABICA Per Kg.</p> <p>Sumatera/Sibolga D.P. DM. 2,73
 Java W.I.B./I DM. 3,52
 Java W.I.B./SUP. DM. 3,70
 Sulawesi Rantepao D.P. DM. 3,30
 Sulawesi Kalosi D.P. DM. 3,78
 Sulawesi Rantepao Triage DM. 2,02
 Sulawesi Kalosi Triage DM. 2,27</p> <p>12. PALA KUPAS Per Kwintal.</p> <p>Siauw ABCD DM. 440,—
 Siauw Rimpel DM. 410,—
 Siauw BWP DM. 331,—
 Papua ABC DM. 338,—
 Papua BWP DM. 277,—</p> <p>13. PALA KUPAS Bukan Banda Bukan Siauw Per Kwintal.</p> <p>ABCD DM. 418,—
 Rimpel DM. 390,—
 BWP. DM. 315,—</p> <p>14. PALA PADANG BIDJO SARING</p> <p>Per Kwintal US\$. 90,—</p> <p>15. PALA PADANG Per Kwintal US\$. 47,—</p> <p>16. BUNGA PALA Per Kwintal.</p> <p>Siauw I DM. 550,—
 Siauw Gruis I DM. 528,—
 Siauw II DM. 508,—
 Siauw Gruis II DM. 486,—
 Papua I DM. 395,—
 Papua Gruis I DM. 378,—
 Papua II DM. 360,—
 Papua Gruis II DM. 346,—</p> <p>17. VANILI Per Kg.</p> <p>kwaliteit ABC US\$. 5,21
 kwaliteit cuttings US\$. 4,49
 kwaliteit loose-cuts US\$. 4,49</p> <p>18. COPRA CAKES/CHIPS Per Kwintal (Kadar Minjak Max. 15%).</p> <p>copra cakes DM. 13,—
 copra chips DM. 14,—
 ground telquel chips/cakes DM. 13,—</p> <p>19. MINJAK ETERIS Per Lb.</p> <p>minjak seroh minimum 85/35% Br. pence 35
 minjak nilam kwaliteit I Br. pence 159
 minjak nilam kwaliteit II Br. pence 146
 minjak cananga ester 20 up Br. pence 174
 minjak akar wangi E.£. 1/17/—</p> <p>20. KATJANG TANAH KUPAS Per Kwintal.</p> <p>m e r a h DM. 55,—
 p u t i h DM. 64,—</p> <p>21. KATJANG TANAH BERKULIT</p> <p>Per Metric Ton US\$. 90,—</p> | <p>22. INDJUK DIPILIH DIPOTONG BASIS</p> <p>STANDAARD 30/90 cm per metric ton ... E.£. 210/—</p> <p>23. BIDJI KAPOK Per Metric Ton.</p> <p>in bulk E.£. 12/—
 in bags E.£. 14/—</p> <p>24. AMPAS TAPIOCA Per Kwintal (Kadar Pati M. 73%).</p> <p>ampas tapioca DM. 4,50
 tepung ampas tapioca DM. 5,40</p> <p>25. GAPLEK Per Kwintal. (Ketjusli Lampung).</p> <p>gaplek gelondong DM. 6,—
 tepung gaplek DM. 5,50</p> <p>26. TEPUNG TAPIOCA Per Kwintal.</p> <p>kwaliteit AAA E.£. 1/3,—
 kwaliteit AA E.£. 1/2,—
 kwaliteit A E.£. 1/1,—</p> <p>27. PINANG Per Kwintal (Bukan Pinang Atjeh).</p> <p>sliced kwaliteit I DM. 30,—
 kwaliteit II DM. 24,—
 kwaliteit III DM. 16,—
 splitz kwaliteit I DM. 24,—
 kwaliteit II DM. 17,—
 bulat putih DM. 12,—
 bulat merah DM. 11,—</p> <p>28. HEWAN HIDUP Per Ekor.</p> <p>sapi ex Bali HK\$. 166,—
 sapi ex Banda Atjeh HK\$. 140,—
 sapi ex Lombok HK\$. 159,—
 sapi ex Sumba HK\$. 117,—
 sapi ex Timor HK\$. 105,—
 sapi ex Djawa Timur/Surabaja .. HK\$. 110,—
 kerbau ex Bali HK\$. 140,—
 kerbau ex Banda Atjeh HK\$. 120,—
 kerbau ex Sumbawa Besar HK\$. 152,—
 kerbau ex Lombok, Bima, Sumba, Flores HK\$. 142,—
 kerbau ex Djawa Timur/Surabaja HK\$. 107,—
 babi HK\$. 35,—</p> <p>29. GAMBIR Per Kwintal.</p> <p>gambir kembang No. 1 E.£. 19/—
 gambir bulat E.£. 16/—
 gambir persegi hitam (extrac) E.£. 7/—</p> <p>30. DJAGUNG Per Metric Ton.</p> <p>kuning/putih US\$. 25,—
 merah US\$. 24,—</p> |
|--|--|

Djakarta, 3 DJULI 1965

PIMPINAN
BIRO LALU LINTAS DEVISI
DIREKTORIUM
 ttd.
R.A. KARTADJOEMENA
 Ketua

Anda ingin SUKSES dalam Perdagangan ?

Datangilah

P.N. PEMBANGUNAN NIAGA



**Aparat Revolusi dalam
bidang perdagangan :**

I M P O R

E K S P O R

K O N T R A K T O R

PROJEK dan INDUSTRI

Untuk suksesnja usaha anda, harap berhubungan dengan :

P.N. PEMBANGUNAN NIAGA

Division² :

- 1. IMPOR BAHAN BANGUNAN**
- 2. IMPOR ALAT² BESAR/MESIN²**
- 3. IMPOR MESIN² SANDANG**

Alamat :

**Djl. Hajam Wuruk no. 127.
D J A K A R T A**

Division² :

- 1. IMPOR SANDANG PANGAN**
- 2. IMPOR BAHAN² CHEMICALIEN/PHARMASI**
- 3. E K S P O R**

Alamat :

**Djl. Gadjah Mada no. 18.
D J A K A R T A**

P. N. DHARMA NIAGA

IMPOR : Mesin² untuk Pertjetakan — Industri — Pertanian — Perkebunan — Tekstil.

Mesin² Perkakas — Pendingin — Minjak Kelapa — Pompa² dan Mesin untuk Pembangunan..

Alat² Besar — Kereta Api — Mesin² Pertambangan Clark Forklifts. Mesin² DIESEL/Generating sets — Alat² RADIO/elektronik Telekomunikasi dan motor² listrik.

PERDAGANGAN UMUM : Dalam Negeri/Antar Pulau.

INSTALASI : Telepon dan listrik dengan tenaga² Ahli.

PERBENGKELAN : Service dan pemasangan mesin.

Kantor Pusat :

Djalan Tanah Abang Barat 6 - 8 - 10 — Djakarta.
P.O. Box 2028 — Tel. 47557 - 47577 - 49978 - 41974
Telex 292

Kantor Tjabang Djakarta

Djalan Djembatan Batu 50 — Tel. 22041 - 22042 - 22043 - 22044
Djakarta Kota.

Tjabang-Tjabang :

BANDUNG — SEMARANG — SURABAJA — MEDAN —
PONTIANAK — PALEMBANG — TJIREBON — JOGJA-
KARTA — MALANG — DJEMBER — BANDJARMASIN —
MAKASSAR — MENADO — AMBON — DENPASAR —
BANDA ATJEH — PADANG dan PAKANBARU.

WARTA



Perdagangan

RECEIVED
11 1966
AP
W299
P433
LIBRARY 18
7



7

HUN KE-XVIII
DJULI 1965

MADJALAH „WARTA PERDAGANGAN“

Terbit tiap 2 Minggu sekali

Diterbitkan oleh :

Departemen Perdagangan Dalam Negeri
beserta Urusan Perdagangan Luar Negeri
dari Kompartimen Luar Negeri/H.E.L.N.
dan Perdagangan Luar Negeri.

Pelindung :

J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/
Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri
BRIG. DJENDERAL A. JUSUF.

Pemimpin Umum :

Kepala Direktorat Marketing dan Research :
Ir. J. J. Pitoy M.A.

Staf Redaksi :

Staf Direktorat Marketing dan Research

Penanggung Jawab :

Kepala Seksi Publikasi Madjalah
Anwar B. Harahap.

Pembantu Tetap :

Prof. Ir. Teko Sumodiwirjo
Kolonel Jusuf Ramli
Major A. Rachman Rukmantara
R. Hertatijanto S.H.
Drs. Waskito
Dr. J. Panglaykim

Pembantu² Khusus :

Kolonel Usman Ismail — Alansjah S.B.P. —
R.H. Tuwaidan M.A. — Drs Sjaaf Muchtar
— Major Drs Sukadjat — Zahar — R. Isa —
Drs A. Aidit — Suprpto — Sudjadi —
A. Karim Usman S.H. — Dudy Djaya.

Alamat Redaksi dan Tata Usaha :

Madjalah „WARTA PERDAGANGAN“
Direktorat Marketing dan Research
Djalan Tanah Abang Timur No. 87
D J A K A R T A

Pelaksana/Pertjetakan :

Kepala Pertjetakan P.N. Karya Tjotas
Burdi Reksodirdjo.

Pembayaran uang langganan dilakukan dimuka dengan :

1. Penjetoran atas Rekening Madjalah
„Warta Perdagangan“ Kode No: KB
W.A.-194, pada Bank Indonesia —
Dj: Thamrin, Djakarta.
2. Dinas Giro dan Tjek Pos atau dengan
pos wissel jang langsung dialamatkan
kepada Tata Usaha Warta Perdagangan
Direktorat Marketing dan Research.

Surat Izin terbit No. . 21A/SK/UPPG/SIT-1965
tanggal 17-4-1965.

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar Redaksi	1
2. Menteri Perdagangan Brigdjen A. Jusuf : Biarkan Kaum Tani tentukan sendiri har- ga produksinja	2
3. Naar het Bruine Front (Adjaran Pemim- pin Besar Revolusi)	3
4. Crash Program Ekspor (Kep. Pres./Pang- lima Besar KOTOE No. 35/KOTOE tahun 1965)	5
5. Pembentukan "Team Crash Program Eks- por KOTOE" (Kep. Pres./Panglima Besar KOTOE No. 36/KOTOE tahun 1965)	9
6. Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Crash Program Ekspor KOTOE : a. Instruksi ² Team Crash Program Ekspor Pusat)	12
b. Instruksi Kepala Direktorat Ekspor ...	14
c. Instruksi Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa	15
7. Presiden Sukarno : Didundurkannja KAA- II merupakan "God's Blessing in Disguise"	16
8. Memperkenalkan : ALDJAZAIR	17
9. Kerdjasama Ekonomi Antar Negara NEFO	18
10. Pembentukan dan penundjukan personalia Perwakilan Depperdag/Urusan Perdagagan Luar Negeri di-tiap ² ibukota Daswati I	21
11. Surat Pendorong Produksi dan ketentuan ² pelaksanaannja	22
12. SPP Tambahan untuk ekspor hasil bumi Riau Kepulauan	23
13. Pengertian dan masalah "Pengawasa ndan Penilaian"	24
14. Pengumuman ² Dep. Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdag. Luar Negeri	30
15. Variaberita singkat Ekonomi/Perdagangan Internasional	33
16. Variaberita singkat Ekonomi/Perdagangan Dalam Negeri	33
17. Pembiajaan/Pembangunan Industri Pesa- wat Terbang Berdikari	33
18. Harga Penjerahan Barang ² Ekspor Golo- ngan II	33

DIMANA WARTA PERDAGANGAN DAPAT DIPEROLEH?

Selain langsung pada **TATA USAHA
NJA**; bagi jang ingin berlangganan/mer-
belinja dapat djuga menghubungi:

1. **PT GUNUNG AGUNG**, Djl. Kwitang No. 13, **DJAKARTA.**
2. **PT Njiur Trading Coy.** Djl. Gunung
Latimodjong No. 29. **Makassar.**

ata Pengantar Redaksi :

Dalam "WARTA PERDAGANGAN" No. 4/1965 (halaman 17 dan 18) telah dikemukakan ketentuan-ketentuan mengenai kebidjaksanaan Pemerintah dalam bidang perdagangan ekspor dan Pembentukan Team Teknis Ekspor. Dengan Keputusan Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 35/KOTOE Tahun 1965 telah ditetapkan CRASH PROGRAM EKSPOR, sedangkan dengan Keputusan Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 36/KOTOE Tahun 1965 ditetapkan Susunan dan Tugas Team Crash Program Ekspor KOTOE. Dengan terbentuknja Team Crash Program Ekspor KOTOE, maka Team Teknis Ekspor tersebut terlebih dahulu diintegrasikan (baik tugas maupun susunan personalianja) dan ditingkatkan mendjadi Team Crash Program Ekspor KOTOE atau disingkat Team Ekspor Pusat/Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Crash Program Ekspor, Team Ekspor Pusat telah mengeluarkan instruksi-instruksinja berturut-turut mengenai :

- a. Pembentukan Team Crash Program Ekspor Daerah (Disingkat Team Ekspor Daerah).
- b. Pendelegasian wewenang kepada Team Ekspor Daerah.
- c. Pembentukan Panitia Harga Penjerahan di Daerah.
- d. Penetapan Harga Penjerahan, dan
- e. Ketentuan-ketentuan untuk memperlantjar realisasi ekspor di pelabuhan-pelabuhan.

Selanjutnja dan dengan tudjuan agar semua aktivita dalam rangka Crash Program Ekspor dapat disinkronisir dan terdapat kesatuan koordinasi dalam pelaksanaannja oleh Direktorat Ekspor dan Biro Lalu Lintas Devisa telah ditetapkan pula ketentuan-ketentuan dalam bidang pelaksanaan teknis.

Diundurkannja Konperensi Afrika-Asia ke II "merupakan RACHMAT TUHAN JANG TERSEMBUNJI" demikian antara lain ditandaskan oleh P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dalam upatjara pelantikan Menteri Prindustrian Tekstil di Istana Bogor. Menjongsong diselenggarakannja Konperensi Afrika-Asia ke-II di Aldjazair nanti, dalam nomor ini dimuat hasil karya dari suatu panitia interdepartemental, dalam pada mana (Departemen) Urusan Perdagangan Luar Negeri telah mengambil prakarsa untuk merumuskan sekedar bahan-bahan dalam bidang kerdjasama ekonomi antarnegara New Emerging Forces nistjaja dapat dipergunakan oleh Delegasi Indonesia ke Konperensi Afrika-Asia ke II. Seperti diketahui, Delegasi Indonesia ke Sidang ke VII Standing Committee Afrika-Asia (Bagian Ekonomi) pada tanggal 4 - 8 Djuni 1965 di Aldjazair telah berhasil memperdjoangkan diterimanja perumusan-perumusan pokok jang bersifat prinsipil dari hasil karya tersebut. Untuk sekedar dapat mengenal "ALDJAZAIR" jang tetap mendjadi tuanrumah Konperensi Afrika-Asia ke II, dimuat suatu artikel singkat mengenai Republik Aldjazair.

Penjempurnaan lebih landjut dari tudjuan penggunaan Surat Pendorong Produksi (S.P.P.), telah diatur dengan Keputusan Bersama Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. Kep. 57/UBS/65, sedangkan dengan Keputusan Bersama No. Kep. 60/UBS/65 telah ditetapkan S.P.P. Tambahan untuk Daerah Tingkat II Kepulauan Riau.

Pembentukan dan Penetapan Personalia Perwakilan Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri ditiap-tiap Daerah Tingkat I, adalah langkah jang konkrit kearah dekonsentrasi dalam rangka Ekonomi Terpimpin.

„BIARKAN KAUM TANI TENTUKAN SENDIRI HARGA PRODUKSINJA”

Hasilkan Konsepsi jang benar-benar realistik jang akan membuat kaum Tani dapat memperbaiki taraf hidup, sebab untuk negara sematjam Indonesia pertanian adalah merupakan basis daripada pertumbuhan industri-industri dimana kita akan mentjapai Sosialisme Indonesia. Demikian ditekankan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri Brigjen A. Jusuf ketika menerima delegasi Musjawarah Besar Tani jang dipimpin oleh Anggota Presidium Mubes Tani A.J.C. Barus pada hari Rabu tanggal 14 Djuli 1965.

Menteri selandjutnja menjatakan agar kepada kaum Tani jang sudah sedjak lama tidak diperhatikan oleh golongan masyarakat lainnja diberikan pendidikan dan indoktrinasi mental, sedangkan mengenai ilmu-ilmu pertanian petani-petani kita sudah djauh lebih madju dibandingkan dengan petani-petani luar negeri lainnja. Dengan demikian kaum Tani kita betul-betul mengerti akan peranannja sebagai sokoguru Revolusi.

„Karena Tani adalah sokogurunja revolusi, maka sudah pada tempatnja kalau kita merombak perlakuan jang bersifat kolonialistis dan feodalstis jang merugikan kaum Tani. Untuk ini, demikian Menteri A. Jusuf, biar kaum tani menentukan sendiri harga daripada produksinja. Djangan kita menjerahkan pada segelintir tengkulak-tengkulak jang bukan sadja menggorok kaum Tani, tapi djuga para konsumen. Petani sebagai produsen bahan pangan dan beras khususnya harus dapat mengetjap djerih-pajahnja itu, lebih besar dibandingkan pada saat-saat sebelumnya .

Brigjen Jusuf mengharapakan kepada Musjawarah Besar Tani dan terutama kepada pimpinan-pimpinan Organisasi-Organisasi Massa Tani jang progresif-revolusioner poros Nasakom untuk benar-benar memperhatikan nasibnja kaum Tani. Djangan kaum Tani itu tjuma untuk tameng dan objek spekulasi sadja.

Menurut Menteri, untuk memperbaiki taraf hidup kaum Tani antara lain :

- Pertama** : Harus dibangkitkan kesadaran kaum Tani, bahwa sebagai tenaga produsen kaum Tani adalah jang paling vital;
- Kedua** : Organisasi pembelian harus dikuasai oleh kaum Tani sendiri; dan
- Ketiga** : Mengenai penggilingan-penggilingan padi, pupuk, djangan dijadikan objek spekulasi, disamping itu operasi harus dibersihkan dari para tengkulak dan diberikan kekuasaan pada kaum Tani untuk menentukan pertumbuhan koperasi itu.

Djika kaum Tani telah diberi kekuasaan maka kita tidak akan tergantung lagi kepada bahan pangan impor.

Menteri A. Jusuf jang berbitjara selama rang lebih dua djam itu dengan penuh antusias menjatakan, bahwa tanpa meningkatkan taraf hidup kaum Tani jang merupakan majorita daripada rakjat Indonesia, djangan harap Sosialisme Indonesia dapat tertjapai.

Untuk ini kita harus memberikan berbagai petunjuk kepada sokoguru revolusi itu, peraturan-peraturan jang merugikan kaum Tani harus dihilangkan, pengairan dan irigasi harus mendapat perhatian kita bersama, demikian mengenai persoalan mekanisasi.

Menurut menteri, mekanisasi pertanian berarti merombak tanah sedemikian rupa, hingga untuk selandjutnja kaum Tani jang ngerdjakannja. Mekanisasi harus mentjiptakan koordinasi bagi para transmigran untuk berusaha dengan baik tanpa membuat mereka lebih menderita daripada ditempat asalnja.

Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno :

Oleh sebab itu, untuk mensukseskan pembangunan **Ekonomi kita, dan untuk mensukseskan „Program Ekonomi Perdjuangan”** kita, prasarana jang fundamental adalah **PEMBANGUNAN MENTAL RAKJAT** kita dalam rangka Nation — dan Character-building, termasuk didalamnya **Program Indoktrinasi** jang harus diintensipkan agar kita semua betul-betul tahu dan mengerti dengan djelas dan terang, apa jang harus kita kerdjakan.

Amanat "BERDIKARI"

Adjaran²

Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno

(III)

Naar het Bruine front!



A nation is, in my mind, an historical group of men of a recognizable cohesion held together by a common enemy.

Theodor Herzl.

Zentgraaff van het "Soerabaiasch Handelsblad" heeft indertijd gepropageerd de vorming van een blank front, ten einde sterker te staan tegenover de massa van "inlanders", die in hun diverse organisaties steeds meer voet beginnen te winnen, ten koste van het prestige van den blanke, dat in het verleden voldoende is geweest, om den overheerscher tegen de "moordzucht en bloeddorst" der Inheemschen te beschermen.

Zijn stem is die eens roependen in de woestijn te vervolgen. Ze heeft geen positieve reactie gevonden van de blanke pers in ons land. Ze kreeg van de partij slechts een negatief antwoord: men verworpt het blanke-front-idee af.

Wij kunnen de houding dier pers op twee manieren uitleggen. Wij kunnen zeggen, dat de blanke overheid naar verbroedering wenscht te streven, maar wederzijdsche waardeering tusschen bruin en blank. Of wij kunnen die houding hierdoor verklaren, dat men voelt, juist door de vorming van een blank front, juist door zich te consolideren, om te zullen verzwakken; dat men voelt dat de vorming van een blank front onherroepelijk is. Het bruin front zal doen geboren worden, waarin de bruine het gewicht van zijn aantal in de weegschaal zou kunnen werpen, wat onmogelijk te centraliseeren zou zijn door hechtheid van organisatie aan blanke zijde alleen.

Welke van de twee verklaringen de aannemelijkste is? Tegen de eerste verklaring moge worden aangevoerd, dat men in het verleden meer behoefte heeft gevoeld aan verbroedering. Het blanke heeft in ons land zich zorgvuldig onzijdig gehouden; hij heeft zich afzijdig gehouden van

alles wat niet "blank" was, hij wees iedere toenaadering van onzen kant af; hij vormde hier een samenleving, die geen aanrakingspunten had met de Indonesische. Waarom dan plotseling dat liebaugeln? Vanwaar die broederschapsideeën?

Wij Indonesiers, wij vinden het verdacht?

Voor de tweede hypothese pleit het feit, dat men van broederliefde overloopt, juist op een oogenblik, dat wij, Indonesiers, door machtsvorming in verschillende organisaties kracht hebben weten te verwerpen; dat wij tegenwoordig geen massa van analphabeten alleen uitmaken, maar een massa van georganiseerde analphabeten die weten, dat wat ons te kort schiet aan schoolse wijsheid, aan organisatie-talent en organisatie-techniek, ruimschoots vergoed wordt door ons getal.

Zeker, wij Indonesiers, wij begrijpen dat waar wij ons hoe langer hoe meer bewust zijn geworden van de macht, ontleend aan onze numerieke meerderheid, gevoegd bij het steeds dalende prestige van den overheerscher, — de verhoudingen steeds meer toegespitst zullen worden. Wij begrijpen, dat het mathematisch juist trekken van de scheidingslijn tusschen den macht-begeerende bruine en den macht-vasthoudende blanke beteekent: het doen geboren worden van de climax der verslechterende verstandhouding tusschen bruin en blank. Maar wij begrijpen ook, dat hoe zuiverder en eerder de antithese is gesteld, hoe karaktervoller de strijd wezen zal; en dat hoe beter het antagonisme is onderkend, hoe juist de doelstelling van den strijd zal zijn.

Wanneer wij dit inzien, dan is de volgende stap, door ons, Indonesiers, te doen duidelijk.

Vooropstellende, dat wij bereid staan om al wat redelijk is aan te nemen en als eigen te adopteeren; dat wij zelfs van den tegenstander

lessen moeten kunnen accepteren, — zij het gemendeerd, zooals onze belangen voorschrijven —, dienen wij het advies van Zentgraaff op te volgen.

Een "blank front" verzwakt de Europeesche stelling in ons land. Welnu, dan volgt daaruit vanzelf, dat een "bruin front" onze positie zal versterken!

Wat de tegenstander verwerpt, moet juist goed voor ons zijn. Naar de machtsvorming moeten wij; naar de machtsvorming, die ons alleen realepolitiek kan mogelijk maken; naar de machtsvorming, die slechts door de vorming van een "bruin front" mogelijk is.

Dat daarom dit bruine front kome. Dat iedere Indonesier inziet, dat gebrek aan eensgezindheid oorzaak is geweest van onze nederlagen in onzen strijd met het Westen. Dat hij leering trekke uit de historie onzer nationale aftakeling, uit het hofgekrakeel bij de Mangkoerats, of uit den strijd tijdens Mangkoebomei en Mas Said, waaruit geen Indonesiers doch alleen de Hollander winnend te voorschijn is gekomen.....

Niet met duizenden en duizenden "inlanders" mag de vreemdeling te maken hebben; niet met millioenen bruinen mag hij hebben te strijden; hij mag alleen tegenover zich hebben één, ondeelbaar, Indonesisch Volk, — welhaast één, ondeelbare Indonesische Natie!

Hoe of dit mogelijk is, waar realiteit is, dat ons volk verdeeld is in zoovele organisaties? Hoe, waar die organisaties alle hebben een eigen ideologie, elk volgt een eigen strijdmethode?

-Vooreerst: Men zij gewarschuwd zich de moeite te geven een unificatie van de diverse partijen te bewerktstelligen. Men zij doordrogen van de onmogelijkheid, een Volk van vijftig millioen zielen, levende in een maatschappelijke structuur van velerlei geleding, te binden in het keurslijf van één enkele organisatie; die indien zulks wel mogelijk was Indonesië een stempel van indeeën — en geestes-armoede zou opdrukken, die uitsluit een vrij, zelfstandig bestaan, waardoor ons Volk dan veroordeeld zou wezen, tot den jongsten dag een slavenjuk te dragen.

En daarom zij federatie onze leus. Federatie, die intact moet laten de persoonlijkheid, de individualiteit, het karakter van de daarbij aangesloten

partijen. En de band, onontbeerlijk om partijen te samen te binden, zij een losse. Hij knelle niet in zijn binding, opdat hij voldoende waarborg kan geven, duurzaam te zijn. Hij zij gelijk de losse band die samen bindt de elementen van het Britisch imperium. Hij zij los, om stevig te zijn.

Het accoord, dat door de Indonesische partijen getroffen zal worden, zal dus geen principieel accoord kunnen wezen. Principieel accoord impliceert de onderwerping der daaraan aangesloten partijen aan principieele discipline; het beteekent zeker offer van de aangesloten partijen aan zelfstandigheid en vrijheid van beweging.

En een bond zonder principieele discipline, zonder offer aan vrijheid, zonder offer aan zelfstandigheid der aangesloten partijen ten bate van den bond zelf, — zoo'n bond is denkbaar. Ja, zoo'n bond is mogelijk, wanneer men genoegzaam waken nemen met incidenteele samenwerkingen. Samenwerking slecht dan, wanneer door de aangesloten partijen unaniem de urgentie daarvan wordt gevoeld. Samenwerking b.v. waar het betreft het vergaderrecht. Samenwerking waar het betreft poenale sanctie. Samenwerking waar het betreft massa-arrestaties of de exorbitante rechten. Samenwerking waar het betreft onze studenten en telaren in Holland Wij, Indonesiers, moeten er ons voor schamen, dat telkens en telkens onze aanvallen op poenale sanctie of suikerkaaktaal met succes worden afgeslagen Wij moeten er ons voor schamen, dat na de eerste berichten over studenten-invallen of -arrestaties géén onzer zijn koffers heeft gepakt, om uit de eerste hand nadere bijzonderheden te vernemen. Dat wij totnogtoe niet in staat zijn, aan onze beweging te schenken het element kracht!

Dat daarom de "Permufakatan Partij Partij Politik Indonesia" spoedig geboren worde. Dat ons rekenschap gevende van onze moeilijke taak te vormen een ondeelbare Natie, te scheppen een vrye soevereine gemeenschap van onafhankelijke in elkander kracht zoeken. Dat wij soons aan één-smeden de ijzeren keten van het blank front!

Ons getal zij Eén!

"Suluh Indonesia Muda", 1

Crash Program Ekspor

**KEPUTUSAN PRESIDEN/PANGLIMA BESAR
KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI
No. 35/KOTOE TAHUN 1965**

**KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA BESAR
KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI**

menimbang :

Bahwa untuk mensukseskan target devisa yang harus diperoleh, perlu segera menentukan crash program ekspor guna mentjapai devisa semaksimal mungkin.

Bahwa pada Rapat Komando Tertinggi Operasi Ekonomi tanggal 4 Djuni 1965 telah diputuskan diantaranya untuk mengadakan „crash program ekspor” guna meningkatkan kelantjaran ekspor.

Bahwa kepada Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi untuk pelaksanaannya Menteri/Sekretaris Umum Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi telah diperintahkan untuk satu minggu setelah Rapat Komando Tertinggi Operasi Ekonomi tanggal 4 Djuni 1965 harus sudah dapat disiapkan perumusan crash program ekspor tersebut diatas.

Hasil pelaksanaan tersebut 3. diatas yang telah diadakan oleh Menteri/Sekretaris Umum Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dan Departemen/Instansi yang bersangkutan telah dapat merumuskan crash program ekspor yang diperlukan dalam waktu yang singkat dewasa ini.

meningat :

Peraturan Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 25/KOTOE Tahun 1964.

Keputusan Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 25/KOTOE Tahun 1964.

Keputusan Presiden No. 40/1965.

Keputusan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. Aa/D/44/65 Tahun 1965.

Keputusan Menteri Koordinator Departemen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri No. 009/3/MPLN/SK/65.

Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 053/5/MPLN/SK/65 Tahun 1965.

Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 058/6/MPLN/SK/65 Tahun 1965.

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

Perencanaan dan program „Crash Program Export” terlampir yang harus dilaksanakan oleh Instansi yang bersangkutan baik Pemerintah, Swasta maupun badan/Organisasi lainnya.



**J.M. Menteri/Sekretaris Umum Staf K.O.T.O.E.
Brigdjen Drs Sukendro.**

Foto : DEPPEN.

2. Untuk melantjarkan dan mensukseskan „Crash Program Export” ini, semua Badan/Lembaga/Team/Panita yang berhubungan dan bersangkutan dengan ekspor yang telah ada diintegrasikan kedalam „Team Crash Program Export KOTOE” ini sebagai unit-unit operasi dan pelaksanaannya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Team Crash Program Ekspor bertanggung-djawab kepada Wakil Panglima Besar I Komando Tertinggi Operasi Ekonomi untuk pelaksanaannya Menteri/Sekretaris Umum Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.
4. Menugaskan kepada Instansi/Badan/Lembaga Pemerintahan/Negara yang bersangkutan baik di Pusat maupun di Daerah untuk melaksanakan ketentuan tersebut 1. diatas seseksama-seksamanya dan setertib mungkin serta mengamankan segala sesuatu.
5. Supaja para Gubernur/Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai Pembantu Komando Tertinggi Operasi Ekonomi didaerah melaksanakan

Bersambung ke halaman 6.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WAKIL PANGLIMA BESAR I KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI

Nomor : 35/KOTOE Tahun 1965 Tanggal 14 Djuni 1965

TENTANG CRASH PROGRAM EKSPOR.

A. Pengapalan :

1. Semua barang-barang ekspor jang sudah "load ready" dipelabuhan-pelabuhan (mainports dan outports) supaja segera dikapalkan.
2. Menetapkan prioritas barang-barang ekspor jang segera harus dikapalkan berdasarkan besarnya nilai ekspor (devisa) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Armada Nasional antar pulau termasuk armada SEMUT, mengerahkan segala daya mampunya untuk mengakumulir kepelabuhan-pelabuhan ekspor (mainports) dengan memberikan prioritas pada **kopra, karet, rottan dan kaju.**
 - b. Armada Nasional Samudra (Djakarta Lloyd) mengkonsentir segala potensinja kepada pengapalan untuk ekspor dari **Karet, Kopra, Lada dan Tembakau.** (Pertimbangan freight-rate menguntungkan).
 - c. Untuk barang-barang ekspor lainnja jang sudah "load ready", agar para pengusaha ekspor mengusahakan sendiri pengapalannya.

Sambungan halaman 5.

- segala crash program export tersebut diatas setjara tertib dan teratur, dan kepada para Pelaksana Penguasa Dwikora Daerah dan Penguasa-Penguasa lainnja diwajibkan turut mengamankan dan menertibkan segala sesuatunya sehingga tertjapai direalisasikannya rentjana dan program tersebut.
6. Supaja semua badan/koperasi/organisasi Swasta dan golongan masyarakat lainnja membantu sampai rentjana dan program „Crash Program Export” tersebut diatas betul-betul tertjapai dan dapat direalisasikan.
 7. Kepada siapapun jang menghalangi atau menghambat terlaksananya „Crash Program Export” ini dapat diambil tindakan jang sekeras-kerasnya.
 8. Pembiayaan untuk Team Crash Program ini dibebankan kepada Anggaran pembiayaan Pemerintahan Agung.
Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkannya.

Dikeluarkan di: Djakarta
Pada tanggal : 14 Djuni 1965.

a.n. PRESIDEN/PANGLIMA BESAR KOMANDO
TERTINGGI OPERASI EKONOMI
WAKIL PANGLIMA BESAR I

t.t.d.

Dr. SOEBANDRIO

3. Untuk mensukseskan crash-program ekspor ini, Bipalindo harus segera mengadakan unit-unit formitas ukuran volume ruang kapal untuk ukuran timbangan standard internasional dari barang jang sedjenis dan sama kwalitas sehingga ukuran volume tersebut berlaku sama baik untuk mainports maupun outports.

B. Loading dan Discharging dipelabuhan-pelabuhan :

1. Port-authority dipelabuhan-pelabuhan agar mengamankan, supaja penggunaan dan pengerahan dari alat-alat muat/bongkar serta buruh pelabuhan supaja di-ambeg-paramartakan untuk karet, kopra, lada, tembakau dan kopi.
2. Berhubung ekspor-drive merupakan suatu USAHA NASIONAL, untuk biaya (dalam bentuk devisa) guna penyelesaian Revolusi kita :
 - a. Kepada para tenaga buruh pelabuhan dan masing-masing ormas-nja sebagai soko-guru Revolusi diserahkan, untuk bersedia dan sanggup menjumbangkan dharma-bhaktinja dengan menghasilkan tenaganja setjara efisien dan apabila perlu dengan tidak terbatas s saja pada waktu atau waktu bekerdja tertentu.
 - b. Kepada para petugas jang berwenang untuk meng"check" kwalitas dan kuantitas barang-barang ekspor jang hendak dikapalkan (Bea & Tjukai) diinstruksikan untuk mengabdikan kepada masyarakat dan Negara (public-servant) dengan tja memberikan pelayanan jang sudah menjadi tugasnja, misalnja kepada para pengusaha ekspor, impor dan perkapalan pada setiap waktu mereka dibutuhkan.

C. Penetapan Harga Penjerahan untuk barang Ekspor.

1. Biro Lalulintas Devisa menetapkan "harga penjerahan" barang-barang ekspor golongan I dan II, dengan ketentuan bahwa :
 - a. Harga penjerahan tersebut berlaku untuk seluruh mainport.
 - b. Harga penjerahan tersebut berlaku untuk outport, sedjauh ekspor atas party jang bersangkutan, pengapalannya sudah dilakukan dari outport langsung ke negara tudjuan.

Apabila ekspor untuk party barang tersebut harus ditranship di mainport, berlaku ketentuan ad 2 dibawah ini.

2. Team Crash Program Ekspor Daerah (Disingkat Team Ekspor Daerah) menetapkan "harga penjerahan" untuk :

a.1. Barang-barang ekspor golongan I dan II khusus dari outport, jang pelaksanaan pengapalannya harus di-tranship di mainport.

2. Direktorat Bea dan Tjukai bersama-sama dengan Bipalindo diwadjabkan mengadakan pengawasan aktif dalam pelaksanaan ekspor ini.

3. Dalam melaksanakan tugas ini, Team Ekspor Daerah menggunakan pedoman, "harga penjerahan" jang ditetapkan oleh B.L.L.D., dengan memperhitungkan ongkos freight dari outport ke mainport jang bersangkutan.

b.1. Barang-barang ekspor golongan III (ekspor lemah/soft products) baik untuk mainport maupun outport.

2. Dalam melaksanakan tugas ini, Team Ekspor Daerah mengambil keputusan jang bidjaksana jang memberi perangsang tjukup bagi para produsen-eksportir, sehingga kemungkinan adanya disparitas terhadap soft products ini dapat dihilangkan.

Ekspor Hewan (ternak dan ikan) :

1. Direktorat Kehewan diinstruksikan mendekonsentrasikan wewenangja untuk memberikan lisensi untuk ekspor kepada Team Ekspor Daerah.

2. Kapal-kapal ternak dari Djakarta Lloyd harus dipergunakan hanja khusus untuk pengangkutan ternak untuk ekspor jang dilakukan oleh P.N. PERHEWANI, P.N. FADJAR TERNAK dan Eksportir-eksportir Ternak lainnja jang mempunyai bonafiditas jang dapat dipertanggung-djawabkan.

3. Kepada P.N. PERHEWANI, P.N. FADJAR TERNAK dan Eksportir ternak lainnja jang telah mempunyai referensi dan rentjana eksport ternak jang dapat dipertanggung-djawabkan, ditugaskan untuk menghubungi Bank-Bank Pemerintah serta membitjarakan hal-hal pembiajan untuk opkoop ternak bagi masing-masing wilajahnja. Dalam melaksanakan tugas selanjutnja P.N. PERHEWANI dan P.N. FADJAR TERNAK menetapkan kebidjaksanaan harga dalam negeri jang tidak akan merugikan industri-industri pengawetan daging jang sudah ada.

4. Departemen Urusan P3 ditugaskan untuk menjediakan modal investasi guna peningkatan ekspor dari hasil peternakan.

5. Untuk mensukseskan eksport ikan atas dasar procedure-umum, berlaku ketentuan tentang eksport soft product seperti tersebut huruf F. 1.2. dan 3. berikut ini.

6. a. Untuk mensukseskan ekspor ikan atas dasar **production sharing**, kepada Bank Indonesia dan B.L.L.D diwadjabkan untuk memberikan fasilitas-fasilitas finansiering dalam djumlah dan waktu jang lajak.

b. Pengaturan tentang pembebanan padjak atas production sharing dalam usaha ini, ditetapkan lebih landjut setjara khusus.

E. Ekspor Kaju :

1. Kaju djati dan kaju-kaju djenis lainnja sebanyak mungkin untuk ekspor.

2. KESOP III Komando Tertinggi Operasi Ekonomi harus mengerahkan alat-alat perhubungan darat, sungai dan laut untuk kellantjaraan pengangkutan ini.

3. Kepada Departemen Kehutanan ditugaskan untuk menghubungi Departemen P3 dan membitjarakan soal penjediaan devisa serta pembiajaannya dalam Rupiah jang berdasarkan rentjana diperlukan untuk pengimporan alat-alat penggergadjian serta alat-alat jang sudah tua.

4. Pelaksanaan administrasi/prosedure ekspor hasil hutan termasuk penetapan harga penjerahan di-dekonsentrasikan kepada Team Ekspor Daerah.

5. Para Pengusaha ekspor hasil hutan diharuskan untuk bersama-sama dengan pembeli mengusahakan kapal-kapal kaju untuk ekspor.

F. Ekspor Soft Products :

1. Semua barang-barang ekspor jang tidak termasuk golongan I dan golongan II, wewenang untuk menetapkan "harga penjerahannya" didelegeer kepada Team Ekspor Daerah. Team Ekspor Daerah dalam melaksanakan tugas ini dapat menempuh kebidjaksanaan teknis seperlunja.

2. Dalam menentukan "harga penjerahan" tersebut angka 1, Team Ekspor Daerah harus mengambil keputusan-keputusan jang tjukup bidjaksana dengan mempertimbangkan kellantjaraan ekspor dan kemungkinan-kemungkinan adanya disparitas. Tindakan ini sebagai perangsang langsung bagi eksportir produsen.

3. Kepada para eksportir dari soft products ini diharapkan untuk mengadakan "social control" dengan tjara melaporkan dengan segera kepada Menteri/Sekretaris Umum Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dalam hal mengalami kesulitan-kesulitan jang disebabkan oleh pedjabat dari instansi-instansi jang bersangkutan dengan bidang ekspor atau oleh pedjabat-pedjabat dari Team Ekspor Daerah sendiri.

4. Kepada Industri-Industri jang dapat menghasilkan "finished goods" untuk ekspor dan raw-materialnja perlu diimpor diberikan fasilitas-fasilitas, berdasarkan suatu usaha jang terkoordinasi (coordinated effort) dari Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan, Urusan Bank Sentral, Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian Rakjat berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

a. Departemen Perindustrian Rakjat menundjuk beberapa perusahaan pabrik/industri, misalnja 10 (sepuluh) buah sebagai pilot project dan bertanggung-djawab baik atas kesanggupannja (kwalitas & target produksi) maupun bonafiditasnja pabrik jang bersangkutan.

b. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan memberikan fasilitas-fasilitas dalam bidang fiskal antara lain perobahan dari bea masuk (impor) raw-materialnja dan bea ekspor dari barang djadi itu.

c. Bank Sentral memberikan Credit Investasi jang bersifat self Liquidating dalam djangka waktu jang lajak.

d. Departemen Perdagangan :

1. Impor-policy ditetapkan berdasarkan production approach serta usaha memberikan "proteksi" terhadap industri didalam negeri dengan djalan antara lain :

pertama, hanja diperkenankan pengimporan bahan baku dan raw-material untuk industri;

Kedua, pengimporan barang-barang jang sudah dapat diproduksi di Indonesia diadakan pembatasan setjara bertahap, sehingga industri dalam negeri dapat berkembang.

Bilamana industri jang bersangkutan mudah dapat memenuhi kebutuhan, pengimporan barang-barang tersebut tidak diizinkan sama sekali.

2. Dalam bidang penetapan harga ekspor, diusahakan pemberian incentive sebanyak mungkin, antara lain penetapan harga penjerahan oleh Team Ekspor Daerah, harus mampu meniadakan disparitas jang diderita oleh Ekspertir-produsen.

5. Untuk mendorong produksi dan peneksporan hasil-hasil perindustrian kejangkeradjinan tangan rakjat, jang belum dikeradjin atau sulit mendapat pasaran diluar, diusahakan ekspornja dengan penetapan harga dsyarat-syarat pembajaran jang menarik bagi pembeli dan/atau pendjualan setjara kejangsinjasi.

Dalam hubungan ini Pemerintah perlu menusahakan :

a. agar oleh para karyawan seni ditjptak "design" jang mentjerminkan kepribadian Indonesia, sedangkan untuk pendjualanja dipasaran Internasional diselarasjkan dengan selera dan daja beli konsum

b. didalam negeri perlu diatur organisasi jang dapat :

1. mengorganisir dan mengkoordinasi huisnijverheids-industrie jang merupakan unit-unit produksi tersendiri jang mengusahakan standardisasi dalam finished-goodnja;

2. mendjamin bahan baku/penolong jang perlu diimpor, dengan memberikan fasilitas seperlunja (a.l. perobahan bea masuk, bea ekspor, dan bebantuan beban fiskal lainnja), sehingga bahan-bahan jang diperlukan tsb. dapat dipenuhi setjara kontinju.

3. menampung setjara kontinju hasil huisnijverheidsindustri ini.

c. Dalam rangka Internasional Trade Promotion, pada tingkat Nasional terkoordinasi effort untuk memasarkan hasil keradjinan tangan ini seperti halnya dengan ekspor dari "finished-goods"

G. Hal-hal jang kemudian ternyata belum tertjara dalam Keputusan ini, dan pengaturan pelaksanaanja akan ditetapkan lebih landjut.

Ditetapkan di : Djakarta

Pada tanggal : 14 Djuni 1965.

a.n. PRESIDEN/PANGLIMA BESAR KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI
WAKIL PANGLIMA BESAR I

t.t.d.

Dr SOEBANDRIO

Team Crahs Program Ekspor Kotoe

KEPUTUSAN PRESIDEN/PANGLIMA BESAR KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI
No. : 36/KOTOE Tahun 1965.

AMI, PRESIDEN/PANGLIMA BESAR KO-
MANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI.

MEMUTUSKAN :

menimbang :

Bahwa untuk mensukseskan Crash Program Ekspor Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, perlu menetapkan organisasi dan tugas "Team Crash Program Ekspor Komando Tertinggi Operasi Ekonomi" seperti tertantum dalam Keputusan Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 35/KOTOE Tahun 1965.

mengingat :

1. Keputusan Presiden No. 121/PLM: T. Tahun 1964 tentang Penjempurnaan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi jo. Keputusan Presiden No. 72/PLM.T. Tahun 1964 dan Keputusan Presiden No. : 26/PLM.T. Tahun 1962;
2. Peraturan Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 25/KOTOE Tahun 1964.
3. Keputusan Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 25/KOTOE Tahun 1964.
4. Keputusan Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 35/KOTOE Tahun 1965 tentang Crash Program Ekspor.
5. Keputusan Menko Kompartimen Luar Negeri/HELN dan Perdagangan Luar Negeri No. 009/MPLN/SK/65 tentang Kebidjaksanaan Perdagangan Luar Negeri.
6. Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 010/3/MPLN/SK/65 Tahun 1965 tentang Target Ekspor Tahun 1965.
7. Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 053/5/MPLN/SK/65 Tahun 1965 dan No. 058/6/MPLN/SK/65 Tahun 1965.

memperhatikan :

Rapat Komando Tertinggi Operasi Ekonomi tanggal 4 Djuni 1965.

mendengar :

Saran-saran dan Pendapat dari Menteri/Sekretaris Umum Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.

Menetapkan :

Pertama :

1. Membentuk Team Crash Program Ekspor Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut "Team Crash Program Ekspor KOTOE".
2. Mengintegrasikan Team Technis Ekspor yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 053/5/MPLN/SK/65 Tahun 1965 dan No. 058/6/MPLN/SK/65 Tahun 1965, dan Team-Team/Panitia-Panitia lainnya yang mempunyai wewenang yang sama kedalam Team Crash Program Ekspor Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.

Kedua :

ORGANISASI :

1. Team Crash Program Ekspor Komando Tertinggi Operasi Ekonomi terdiri dari :
 - a. Team Crash Program Ekspor Komando Tertinggi Operasi Ekonomi yang berkedudukan di Djakarta, disingkat Team Ekspor Pusat.
 - b. Team Crash Program Ekspor Komando Tertinggi Operasi Ekonomi yang berkedudukan di Daerah Swatantra Tingkat I disingkat Team Ekspor Daerah.
2. Team Ekspor Pusat terdiri dari :
 - A. Dewan Harian Team Ekspor Pusat, beranggotakan :
 1. Pembantu Utama Menteri Perdagangan Luar Negeri sebagai Ketua merangkap Anggauta.
 2. Wakil dari KESOP III — sebagai Wakil Ketua merangkap Anggauta.
 3. Wakil dari KESOP I — sebagai Anggauta.
 4. Wakil dari KESOP V — sebagai Anggauta.
 5. Kepala Direktorat Marketing dan Research Departemen Perdagangan — sebagai Anggauta.
 6. Wakil dari Bank Indonesia — sebagai Anggauta.

7. Wakil dari Direktorat Ekspor — sebagai Anggauta.
8. Wakil dari Direktorat Bea dan Tjukai — sebagai Anggauta.
9. Wakil dari Bipalindo — sebagai Anggauta.
10. Wakil dari B.L.L.D. — sebagai Anggauta.
11. Wakil dari Departemen P3 sebagai Anggauta.
12. Wakil dari Staf Sekretariat Umum Komando Tertinggi Operasi Ekonomi sebagai Anggauta.
13. Seorang Sekretaris atau lebih jang ditundjuk dan ditetapkan oleh Menteri/Sekretaris Umum Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.

B. Dewan Paripurna Team Ekspor Pusat, terdiri dari :

1. Semua Anggauta dari Dewan Harian Team Ekspor Pusat dan mempunjai tugas-tugas/fungsi jang sama dalam Dewan Paripurna Team Ekspor Pusat.
2. Ditambah dengan :
 - a. Wakil dari Kesop II — sebagai Anggauta.
 - b. Wakil dari Direktorat Kehewanian Departemen Pertanian sebagai Anggauta.
 - c. Wakil dari Departemen Pertanian sebagai Anggauta.
 - d. Wakil dari Departemen Kehutanan sebagai Anggauta.
 - e. Wakil dari Departemen Perikanan dan Pengusahaan Laut sebagai Anggauta.
 - f. Wakil dari Departemen Koperasi, Transmigrasi sebagai Anggauta.
 - g. Wakil dari Departemen Perkebunan sebagai Anggauta.
 - h. Wakil dari G.P.E.I.S. sebagai Anggauta.
 - i. Wakil dari HELN sebagai Anggauta.
 - j. Wakil dari Departemen Kedjaksaan sebagai Anggauta.
 - k. Wakil dari Dewan Produksi Nasional sebagai Anggauta.
3. Team Ekspor Daerah, terdiri dari :
 - a. Gubernur/Kepala Daerah Pembantu Komando Tertinggi Operasi Ekonomi di Daerah sebagai Ketua merangkap Anggauta.
 - b. Kepala Perwakilan/Tjabang Departemen Perdagangan (Luar Negeri) sebagai Ketua Harian merangkap Anggauta.

- c. Anggauta-Anggauta Team terdiri dari :
 - Kepala Tjabang/Wakil² dari Direktorat Ekspor dan Direktorat Bea dan Tjukai.
 - Kepala Daerah Pelabuhan Tingkat I/Port Authority, Bipalindo, Bank Indonesia atau Bank Devisa jang ditundjuk oleh Bank Indonesia B.L.L.D., G.P.E.I.S. dan Kedjaksaan.
- d. Satu atau dua orang Sekretaris dari Tjabang Departemen Perdagangan (Luar Negeri) dan/atau dari Tjabang Bank Indonesia/Bank Devisa jang ditundjuk oleh Tjabang Bank Indonesia.

4. Pepehrada dan Anggauta Pantja Tungal lainnja wadajib membantu dan mengamankan usaha² Team Crash Program Ekspor Daerah, dan bertindak selaku Penasehat Team.

Ketiga :

TUGAS :

1. Team Ekspor Pusat bertugas :
 1. mengatur, mengawasi mengamankan dan mengikuti pelaksanaan crash program ekspor.
 2. mengawasi kegiatan dan pelaksanaan serta keputusan-keputusan jang diambil oleh Team Daerah;
 3. memutuskan hal-hal jang diadjudkan oleh Team Daerah;
 4. mengkoordinasikan dan menjalurkan ketentuan-ketentuan pendelegasian wewenang dari tiap-tiap instansi Pusat jang bersangkutan kepada masing-masing tjabangnja;
 5. dalam melaksanakan tugasnja, Team Crash Program Ekspor menerima petunjuk dan bertanggung-djawab kepada Menteri/Sekretaris Umum Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.
2. Team Ekspor Daerah bertugas :
 1. mendjalankan keputusan-keputusan dan instruksi-instruksi Team Pusat jang pelaksanaannja dilakukan ditingkat Daerah;
 2. membahas dan memetjahkan kesulitan-kesulitan dalam bidang teknik ekspor jang timbul sewaktu-waktu;
 3. bersama-sama menggariskan kebijaksanaan pelaksanaan teknis ekspor sesuai dengan keadaan setempat dengan bertanggung teguh kepada norma-norma jang telah ditentukan oleh Team Pusat.
 4. mengajukan persoalan-persoalan jang prinsipial kepada Team Pusat.

Bersambung ke halaman :



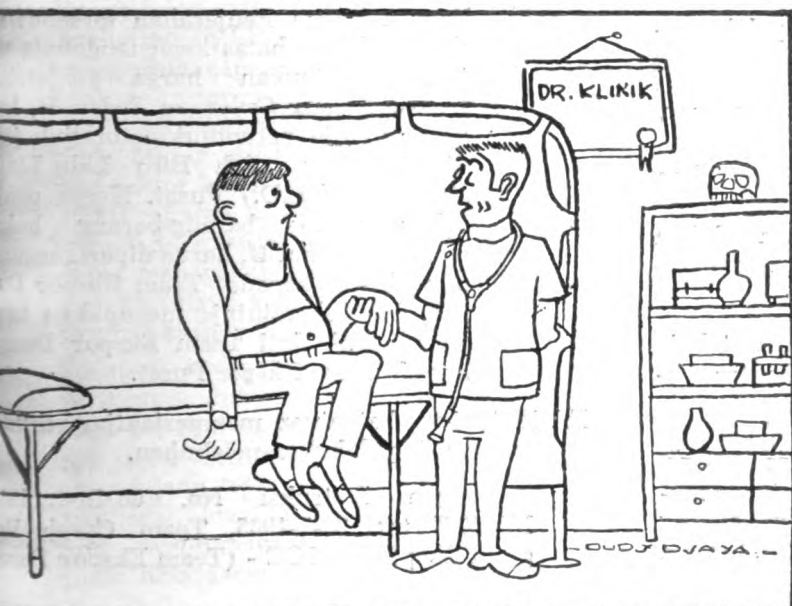
"BAPAK PINGSAN MELIHAT GRAFIK JANG DIGANTUNG TERBALIK ITU"

"Bapak pingsan melihat grafik jang digantung terbalik itu".



"SAUDARA KITA JANG DIEKSPOR KEMBALINJA DJADI BEGITU....."

"Saudara' kita jang di-ekspor kembalinja djadi begitu"



"HM, KALAU EKSPOR TUAN TURUN MAKA TEKANAN DARAH TUAN NAIK?"

"Hm, kalau ekspor Tuan turun maka tekanan darah Tuan naik".

KETENTUAN - KETENTUAN PELAKSANAAN CRASH PROGRAM EKSPOR KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI

A. INSTRUKSI-INSTRUKSI TEAM CRASH PROGRAM EKSPOR (TEAM EKSPOR PUSAT).

I. Pembentukan Team Crash Program Ekspor Daerah.

Ketua Team Ekspor Pusat KOTOE, dengan suratnya No. 01/INSTR/TEP-KOTOE/65 tertanggal 8 Djuli 1965 menginstruksikan kepada Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, sebagai berikut :

- 1) Dengan keluarnya Keputusan Presiden/Panglima Besar KOTOE No. 35/KOTOE Tahun 1965 dan No. 36/KOTOE Tahun 1965, maka segera dibentuk Team Crash Program Ekspor Daerah dengan susunan dan tugas-tugas sesuai dengan Keputusan Presiden/Panglima Besar KOTOE No. 36/KOTOE Tahun 1965.
- 2) Pelaksanaan daripada ketentuan-ketentuan Keputusan Presiden/Panglima Besar KOTOE Tahun 1965, adalah sesuai dengan pedoman-pedoman yang akan diinstruksikan lebih lanjut.

II. Pendelegasian Wewenang Kepada Team Ekspor Daerah dan Pembentukan Panitia Harga Penjerahan Daerah.

Ketua Team Ekspor Pusat dengan Instruksi No. 02/Instr./TEP-KOTOE/65 tertanggal 8 Djuli 1965, telah menginstruksikan kepada Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa (B.L.L.D.) sebagai berikut :

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Keputusan Presiden/Panglima Besar KOTOE No. 35/KOTOE Tahun 1965, Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa (B.L.L.D.) supaya segera mendelegasikan kepada Team Ekspor Daerah wewenang untuk menetapkan „Harga penjerahan” atas barang-barang ekspor sebagaimana dimaksudkan dalam dictum C.2 Lampiran Keputusan tersebut diatas.

Selanjutnya dalam pelaksanaan teknis hendaknya Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa memberikan pedoman-pedoman praktis kepada Tjabang-tjabang Biro Lalu Lintas Devisa di Daerah-Daerah yang menjadi anggota tetapi dari Panitia yang bertugas menetapkan „harga penjerahan” barang-barang ekspor yang selanjutnya disebut „Panitia

Harga Penjerahan”. Panitia Harga Penjerahan bertanggung jawab kepada dan bertindak atas nama Team Ekspor Daerah.

Untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan hendaknya tiap Instruksi yang menjangkut masalah ini, Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa mengemukakan lebih dahulu kepada Team Ekspor Pusat untuk disepakati bersama. Akhirnya dinjatakan, bahwa Team Ekspor Pusat perlu menerima Copy dari tiap Instruksi tersebut.

III. Penetapan Harga Penjerahan.

Dengan Instruksi No. 03/Instr./TEP-KOTOE/65 tertanggal 8 Djuli 1965, Ketua Team Ekspor Pusat telah menginstruksikan kepada Team-Team Ekspor Daerah mengenai Penetapan Harga Penjerahan sebagai berikut :

- 1) Dalam melaksanakan tugas menetapkan harga penjerahan barang-barang ekspor Team Ekspor Daerah harus menempuh kebijaksanaan teknis seperlunya, dengan memperhatikan keadaan setempat.
- 2) Penetapan harga penjerahan tersebut setjara kontinu ditugaskan kepada panitia tetap yang terdiri dari unsur-unsur Direktorat Ekspor (DEK) dan Biro Lalu Lintas Devisa (B.L.L.D.) di pelabuhan-pelabuhan ekspor yang bersangkutan, yang selanjutnya disebut Panitia Harga Penjerahan.
- 3) Panitia Harga Penjerahan tersebut selanjutnya diwajibkan dalam batas kewenangannya untuk menetapkan harga penjerahan barang-barang Golongan I dan II, kepada para pedagang-pedagang pada petundjuk-petundjuk yang diinstruksikan oleh Biro Lalu Lintas Devisa (B.L.L.D.) Pusat. Harga penjerahan untuk barang-barang buku Golongan I dan II, harus dipertanggungjawabkan kepada Team Ekspor Daerah, dan selanjutnya merupakan tanggungjawab dari Team Ekspor Daerah kepada Team Ekspor Pusat.

IV. Ketentuan-ketentuan memperlantjar realisasi ekspor di pelabuhan-pelabuhan.

Dengan Instruksi No. 06/Instr./TEP-KOTOE ttt. 20-7-1965, Team Crash Program Ekspor KOTOE - (Team Ekspor Pusat

telah menginstruksikan tentang ketentuan-ketentuan memperlantar realisasi ekspor di-pelabuhan-pelabuhan, kepada :

1. Kantor Besar Direktorat Bea dan Tjukai
2. Direktorat Ekspor Pusat
3. Semua Kantor Besar Bank Devisa
4. Biro Lalu Lintas Devisa Pusat
5. Port Authority
6. BIPALINDO/BAPELUMA
7. Team Ekspor Daerah.

Bahwa tata kerdja serta prosedur ekspor menurut peraturan dari Direktorat Bea dan Tjukai **tetap berlaku**. Sehubungan dengan itu supaya Direktorat Bea dan Tjukai meng-instruksikan lagi kepada para KDBT/KKBT untuk mengintensipkan pengawasan demi kelantjaran pelajanan dokumen² ekspor dan bertindak menghilangkan hambatan² dan pe-kerdjaan „doublures” baik dari pihak Bea dan Tjukai sendiri atau dari Instansi lain, jang ikut mentjampuri bidang Bea dan Tju-kai.

Mengambil langkah² seperlunya supaya :

- a. Disamping prosedur pemuatan barang² ekspor melalui „diepzee” gudang, diper-bolehkan pula dengan prosedur „eigen afscheep” dengan ketentuan bahwa bar-ang²nja tetap sewaktu-waktu dapat di-awasi oleh pabean. Dalam rangka „Crash Program Ekspor” gudang-gu-dang bebas kepunjaan veem atau eks-portir dapat didjadikan gudang² „diep-zee” (Gudang ekspor).
Izin untuk maksud itu diberikan oleh KDBT/KKBT dengan memperhatikan keamanan/pengawasan barang².
- b. Fasilitas pemberian „vooropslag” diper-luas dengan barang² ekspor jang mem-punyai volume besar dan tidak terbatas hanya terhadap barang ekspor seperti bungkil dan cattle fodder. Surat izin pe-ngeluaran (S.I.P.) adalah mutlak untuk mengadakan permohonan mendapatkan fasilitas „vooropslag”. Pemberian fasili-tas „vooropslag” harus ditudjukan pada faktor efisiensi dan memperhati-kan faktor kedatangan kapal, jang akan ambil muatan dan harus dapat ditjegah terhadap penjalaghunaanja, seperti dapat merupakan gangguan kongesti di-gudang atau menjulatkan pemeriksaan barang² ekspor lainnja.
- c. Sedapat mungkin diberikan fasilitas verificatie dokumen² dengan melepas-kan physical-inspection (apa jang dise-but „tafel-verificatie” terhadap barang² ekspor jang tidak dapat diragukan lagi mengenai kualitas dan volume/berat-nja, misalnja terhadap karet jang ber-mutu RSS I dengan berat/ukuran me-

nurut Internasional-Standard. Para KDBT/KKBT diberikan wewenang se-penuhnja, berdasarkan pengetahuan ser-ta pengalamannja untuk memberikan fasilitas „tafel-verificatie” terhadap barang² ekspor lainnja.

- d. Atas permohonan eksportir/veem, un-tuk **kebutuhan verificatie** diidjinkan terus bekerdja sesudah djam kerdja sampai selesai pekerdjaan.
- e. Alat² timbangan dan alat² lainnja un-tuk kebutuhan pemeriksaan seperti alat² pembukaan peti² dan bal-karet, su-paja diusahakan oleh para penanggung-djawab dan pihak jang berkepentingan. Bila perlu, para eksportir, veem/perusa-sahaan angkutan supaya ikut membantu kekurangan peralatan tersebut.
- f. Para KDBT/KKBT atau petugas Bea dan Tjukai jang berwenang harus ikut membantu terhadap penetapan prioritas pengapalan barang² ekspor berdasarkan besarnja nilai ekspor devisa untuk ke-pentingan nasional dengan tidak meng-urangi perhatian terhadap ketentuan² jang lazim dalam perdagangan Interna-sional, seperti tanggal pemuatan ter-akhir (last shipment date) jang di-tentu-kan pada Letter of Credit (L/C). Barang tidak diberikan izin „fiat muat” oleh pabean, bilamana batas waktu peng-apalan tersebut pada L/C jang bersang-kutan sudah berachir. Barang ekspor itu baru dapat lagi diizinkan untuk di-muat :
 - 1) bilamana L/C bersangkutan telah di-per-pandjang oleh Bank jang mengeluarkan L/C itu (djadi Bank diluar negeri).
 - 2) atau prosedur lainnja jang ditempuh oleh Bank Devisa menurut ketentuan BLLD jang berlaku dengan prosedur ekspor tanpa L/C.
3. a. Agar berhubung dengan adanja berbagai peraturan larangan dan pembatasan dari Instansi Pusat atau Daerah terha-dap bermacam barang ekspor, supaya Direktorat Bea dan Tjukai dalam Ranga-ka Crash Program Ekspor mengambil ketentuan bahwa Surat Idjin Pengelu-aran (S.I.P.) dari Direktorat Ekspor di-djadikan dasar untuk idjn pemuatan.
b. Agar setiap pengeluaran S.I.P. oleh pi-hak Direktorat Ekspor Tjabang tetap memperhatikan ketentuan² larangan/pembatasan mengenai pengeluaran ba-rang² tersebut dalam huruf a.
4. Agar sambil menunggu penjelesaian admi-nistratif dari Instansi BLLD dan Direktorat Ekspor Tjabang, Direktorat Bea dan Tjukai

dipelabuhan² dapat bertindak untuk memberikan „fiat muat” dengan ketentuan bahwa keamanan penerimaan devisa untuk negara terjamin.

5. Dalam hal penukaran kapal, kepada BIPA-LINDO diberikan wewenang oleh Team Crash Program Ekspor untuk mentjantumkan nama kapal jang baru serta kwantum barang jang d muat dalam kapal baru tersebut dalam surat formulir E3 jang bersangkutan dengan di „fiat” oleh Direktorat Bea dan Tjukai setempat, sementara itu Bipa-Lindo dengan segera memberi advis kepada Bank tempat penutupan kontrak valuta jang bersangkutan tentang nama kapal jang baru serta kwantum barang jang dimuat kedalam kapal tersebut.
6. Dalam rangka Team Crash Program Ekspor, instansi² lainnja tidak diidjinkan mengambil tindakan langsung tanpa idjin dari Team Crash Program Ekspor Daerah jang bersangkutan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkannja (20-7-1965).

B. INSTRUKSI KEPALA DIREKTORAT EKSPOR.

Kepala Direktorat Ekspor dalam Instruksi no: 2843/K.D./DEK/1965 tertanggal 9-7-1965, telah menginstruksikan kepada Kepala² Seksi Ekspor/Tjabang Direktorat Ekspor sbb.:

- 1).- Pada tiap² Ibu Kota Daswati I dibentuk Team Crash Program Ekspor Daerah (disingkatkan : Team Ekspor Daerah);
Dipelabuhan² ekspor tertentu, dibentuk Panitia Harga Penjerahan terdiri dari Kepala Seksi/Tjabang Direktorat Ekspor dan Kepala B.ro Lalu Lintas Devisa Tjabang, jang diwenangkan menetapkan harga² penjerahan jang disertai penetapan djenis dan mutu barang jang djelas untuk penutupan kontrak valuta.
Pembagian tugas dalam hubungan tersebut diatas, adalah sebagai berikut :
 - a. penetapan harga² penjerahan dari barang² /hasil² bumi ekspor jang terdaftar dalam Golongan I dan II ketjuali lada, cassiavera, copra dan tembakau, dilaksanakan oleh Biro Lalu Lintas Devisa, Vide Instruksi Biro Lalu Lintas Devisa Pusat No. 6/BUD/Instruksi/65 tanggal 10 Djuli 1965.
 - b. penetapan harga² penjerahan barang²/ hasil² bumi ekspor lainnja, ditentukan oleh Kepala Seksi/Tjabang Direktorat Ekspor bersama² B.L.L.D. Tjabang, dengan memberikan perangsang jang me-

mungkinkan eksportir jang bersangkutan memperkembangkan ekspornja, segala sesuatunja dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Harga Penjerahan atas nama Team Ekspor Daerah.

- 2). Mengenai penetapan harga² penjerahan dari barang²/hasil² bumi ekspor jang dipasarkan dengan „marketing policy” ditetapkan ditingkat Nasional cq Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri, jaitu mengenai :
 - a. lada, cassiavera, copra dan tembakau;
 - b. „finished goods” jang dihasilkan oleh perusahaan² industri jang memerlukan impor bahan² bakunja;
 - c. „mutu menjimpang” dari mutu standard buat sementara d.tetapkan oleh Direktorat Ekspor Pusat dengan kerdja sama dengar Biro Lalu Lintas Devisa Pusat.
- 3). Berdasarkan kontrak valuta jang ditutup pada Bank, dan barang jang ready-stock Kepala Seksi/Tjabang Direktorat Ekspor mengeluarkan Surat Idzin Pengeluaran.
- 4). Surat Idzin Pengeluaran tidak diberikan terhadap kontrak² ekspor dimana pembelinj belum terdaftar pada Direktorat Ekspor. Untuk kelantjaran pekerdjaan, d.instruksikan agar daftar nama² pembeli jang telah ada pada kantor Seksi/Tjabang DEK, diserahkan kepada Bank Devisa setempat, untuk mereka pedomani ketika penutupan kontrak valuta.
- 5). Sebagai anggota dari Team Ekspor Daerah diibu kota Daswati I, Kepala Seksi/Tjabang Direktorat Ekspor harus mendorong dan bersama instansi lain, mengusahakan :
 - a. Memperintji target ekspor bulanan daerah dalam tiap² commodity, djumlah dan harga;
 - b. Merentjanakan pelaksanaan tehnik dalam rangka kebidjaksanaan umum dari Pusat;
 - c. Mengadakan program kerdja tentang pengangkutan darat/sungai/laut, perdagangan dan lain² jang berhubungan dengan bidang pelaksanaan ekspor;
- 6). Tiap² Seksi Ekspor pada Perwakilan Dependa diibu kota Daswati I mengatur dan mengawasi Tjabang² Direktorat Ekspor jang berada dipelabuhan² lain dalam wilayah Daswati I tersebut. Setelah dibitjarakan dalam Team Ekspor Daerah, tiap² Tjabang dimaksud dapat ditetapkan sebagai semat mata pelabuhan realisasi ekspor atau sebagai Tjabang Direktorat Ekspor, dimana eksportir² dapat menempuh prosedur ekspor dimulai dengan penutupan kontrak valuta sampai pada realisasi ekspor dsbnja.

Dalam rangka Panitia Harga Penjerahan harus diadakan kerdja sama jang seerat-eratnja dengan Biro Lalu Lintas Devisa setempat dan dalam hal jang diperlukan untuk kelantjaran ekspor pada umumnja, senantiasa meminta bantuan/keputusan Team Ekspor Daerah.

Untuk menghindarkan kematjetan ekspor dari tempat² jang mungkin belum diatur dalam Instruksi ini, prosedur dan ketentuan² ekspor jang berlaku, tetap berdjalan terus, sampai ditentukan lain oleh Team Ekspor Daerah atau berdasarkan Instruksi dari Pusat.

Ketentuan² mengenai keharusan pengiriman laporan 10 — harian, bulanan dan tahunan dari kegiatan daerah — kerdja Seksi/Tjabang Direktorat Ekspor sesuai dengan Instruksi² Kepala Direktorat Ekspor selama ini, tetap berlaku, dengan mengirimkan salinannja kepada Team Daerah.

C. INSTRUKSI PIMPINAN B.L.L.D.

Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa dalam Instruksi No. 6/BUD/Instruksi/65 tertanggal 10 Juli 1965, telah memberi petunjuk kepada semua Tjabang B.L.L.D. diseluruh Indonesia tentang pelaksanaan dari Crash Program Ekspor TOE, sebagai berikut :

Tjabang B.L.L.D. ditunjuk sebagai Anggota Team Crash Program Export Daerah Daswati setempat.

Menetapkan Harga Penjerahan untuk Barang Ekspor.

Menunjuk pada Lampiran Keputusan No. KOTOE ayat C, ditetapkan sbb. :

Biro Lalu Lintas Devisa menetapkan harga penjerahan barang² ekspor golongan I dan dengan ketentuan bahwa :

Harga Penjerahan tersebut berlaku untuk seluruh mainport.

Harga Penjerahan tersebut, sedjauh ekspor atas party jang bersangkutan, penga-

palannja sudah dapat dilakukan dari outport langsung kenegara tudjuan, harus disesuaikan dengan ongkos pengangkutan jang sebenarnya (actual freight) dari outport jang bersangkutan dengan mengikuti Pengumuman Harga Penjerahan jang setjara berkala dikeluarkan.

Sepandjang mengenai ekspor karet, dalam menetapkan harga penjerahan itu Tjabang B.L.L.D. mengikuti Instruksi Pimpinan B.L.L.D. No. 5/BUD/HP/INSTRUKSI/65 tanggal 22 Djuni 1965.

2. Apabila ekspor untuk party barang tersebut harus ditranship di mainport, berlaku ketentuan² seperti tersebut dibawah ini :
 - a. Sepandjang Pengapalan dari outport ke mainport dari barang² ekspor golongan I dan II sudah merupakan ekspor, c.q. pengapalan dari outport ke mainport dilaksanakan oleh first-carrier dengan mengeluarkan **Through-Bill of Lading**, Tjabang B.L.L.D. harus mengikuti Pengumuman Harga Penjerahan jang setjara berkala dikeluarkan dan Instruksi Pimpinan B.L.L.D. seperti dimaksudkan dalam ayat 1 sub b diatas (sekedar mengenai karet).
 - b. Apabila dalam hal pengapalan barang ekspor dari outport ke mainport seperti tersebut dalam sub 2 a diatas diperlukan penindjauan harga penjerahan dari barang² ekspor jang bersangkutan, baik dari golongan I dan II, maupun dari barang ekspor lainnja jang tidak termasuk golongan I dan II maka persoalan tersebut harus diadjudkan kepada Team Crash Program Export Daerah (disingkat Team Export Daerah) untuk diputuskan. Dalam menetapkan harga penjerahan untuk barang² ekspor golongan I dan II Team tersebut berpedoman pada harga penjerahan jang ditetapkan oleh Biro Lalu Lintas Devisa.
3. Tjabang B.L.L.D. diwadjibkan pula untuk mengumumkan harga penjerahan jang ditetapkan oleh Team Export Daerah seperti dimaksudkan dalam ayat 2 sub b diatas, sehingga sekaligus dapat dipergunakan pormulir E.3 (dengan demikian pormulir E.1 tidak diperlukan lagi).

PRESIDEN SUKARNO :

DIUNDURKANNJA KONPERENSI AFRIKA ASIA KE II MERUPAKAN "GOD'S BLESSING IN DISGUISE"

Presiden Sukarno menegaskan dalam amanatnja pada upatjara pelantikan Menteri Perindustrian Tekstil Brigdjèn Ashari jang berlangsung hari Sabtu tanggal 10 Djuli 1965 di Istana Bogor, bahwa salah satu ketakutan kaum imperialis terhadap Konperensi AA-II ialah bukannya semata-mata takut kepada solidarita AA, tetapi lebih dari itu ialah takut kalau gagasan BERDIKARI jang ditjetuskan Indonesia diambil oper dan diteruskan oleh negara-nagara AA. Sebab djikalau semua negara-nagara AA sudah dapat Berdikari, maka itu berarti terpukulnja lontjeng kematian bagi negara-nagara imperialis dibumi AA. Karena itulah sedjak lama kaum imperialis sudah berusaha menggagalkan KAA-II.

Kepala Negara menandakan, bahwa sjukurlah Indonesia lantas mengambil prakarsa untuk memotong usaha imperialis dalam menjambut KAA-II, jaitu dengan djalan menjelenggarakan Pertemuan Puntjak 4 Pemimpin Afrika-Asia, antara Presiden Nasser, Presiden Ayub Khan, PM Chou En Lai dan Presiden Sukarno. Keempat Pemimpin AA itu menandakan, bahwa diundurkannja Konperensi Afrika-Asia II bukan berarti gagalnja solidarita Afrika-Asia atau kemunduran Afrika-Asia, melainkan malah merupakan „rachmat Tuhan jang tersembunji” (“God’s blessing in disguise”), jaitu terwujudnja semangat anti imperialisme jang lebih hebat lagi pada Konperensi Afrika-Asia II tanggal 5 Nopember nanti.

Dengan bukti bahwa kaum imperialis sangat takut terhadap gagasan BERDIKARI jang dapat meliputi seluruh bangsa-bangsa Afrika-Asia itu, maka kita sebagai bangsa jang mentjetuskan gagasan itu harus dapat berbangga hati.

Presiden Sukarno dalam amanatnja setelah menjelaskan betapa pentingnja sandang bagi rakjat, menegaskan selandjutnja bahwa Pemerintah jang bertudjuan untuk membina masjarakat jang adil dan makmur, telah menjadikan soal sandang sebagai programnja jang utama.

Diingatkannja, bahwa pada djaman bahari rakjat Indonesia dapat berswasembada dalam soal sandang jang terbuat dari kapas; hanja sandang

jang terbuat dari sutra diimpor dari India dan Tiongkok. Namun sekalipun masih mengimpor sutra, tapi sebagai gantinya rakjat Indonesia mengeksport djuga bahan-bahan tjat. Selain bahan-bahan rempah-rempah Indonesia mengeksport buah-buahan, sonokeling dan mengkudu, dan djuga sesuatu serangga, jang dinegara lain diburu tjat merah pewarna sutra.

Diterangkan oleh Presiden, bahwa setelah kaum imperialis datang, maka kemampuan rakjat untuk berswasembada dan membuat sandang djadi perlemah, karena salah satu tudjuan kaum imperialis adalah menjadikan negara djadjahannja sebagai tempat pasaran barangnja.

Kini kita merdeka, maka kita harus sanggup lagi mengembangkan kemampuan kita untuk berdikari dalam bidang sandang dengan djalan membuat bahan-bahan serta alat-alat pembuat sandang sendiri. Demikian Presiden. (ANTARA).



P.J.M. Presiden sedang memberi amanat pada upatjara pelantikan Menteri Perindustrian Tekstil Brigdjèn Ashari di Istana Bogor pada tanggal 10 Djuli 1965.

Foto : I.P.P.

Memperkenalkan:

Aldjazair

Tetap menjadi tuan-rumah KAA II.

Aldjazair, yang dianeksasi bulan Pebruari 1842 dan sejak itu dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perantjis, memperoleh kemerdekaannya yang penuh lewat perjuangan kemerdekaan yang gigih pada tanggal 3 Djuli 1962. Luasnya 13.883 mil-persegi dengan penduduk, yang diperkirakan tahun 1960, 11.020.000 jiwa.

Letaknya di Afrika Utara, memandjang 640 mil sepanjang Laut Tengah antara Tunisia dibagian timur dan Maroko dibagian Barat. Penduduknya kira-kira satu djuta, 80 prosennya kelahiran Aldjazair. Penduduk aslinya bangsa Arab dan beragama Islam.

Hampir delapan tahun pihak imperialis Perantjis berusaha keras dengan berbagai tjara, dengan senjata api, pedang, pengkhianatan dan penipuan, untuk mematahkan kehendak rakyat Aldjazair bagi kemerdekaan dan kebebasan sedjati. Tetapi segala usahanya itu gagal dan pada tahun 1962 Perantjis terpaksa mengakui setjara terus terang kekalahannja di Aldjazair berhasil memenangkan pengakuan atas haknya untuk menentukan nasib-sendiri dan memperjuangkan tjara hidupnya yang merdeka.

Atas kemenangannya ini rakyat Aldjazair harus berdebat dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Lebih dari satu djuta rakyat Aldjazair tewas untuk kemerdekaan Ibu-Pertiwi dalam pertempuran², pemboman² atau sebagai korban tindakan² teroris. Lebih dari dua djuta rakyat Aldjazair didjebloskan ke dalam penjara, kamp² konsentrasi atau mengungsi ke Tunisia dan Marokko.

Sedjumlah orang dan golongan di Aldjazair yang menginginkan kemerdekaan sedjati bagi negaranya, dalam menghadapi pendjadjahan Perantjis, membentuk dua front utama yang revolusioner: Gerakan Nasional Aldjazair (MMA) dan Front Pembebasan Nasional Aldjazair (FLN). Dibawah pimpinan tentara FLN inilah, rakyat Aldjazair dibimbing maju untuk akhirnya menjapai kemenangan.

Aldjazair yang merdeka.

FLN mendirikan sebuah pemerintah sementara tanggal 18 September 1959 dengan Ferhat Abbas sebagai perdana menterinja. Ia kemudian digantikan oleh Youssef Ben Khedha tanggal 27 Agustus 1961. Antara tahun 1961 dan 1962 terdjadi kerusuhan² berdarah yang ditimbulkan oleh apa yang dinamakan dirinja „Organisasi Tentara Rahasia Perantjis” yang lazim disebut OAS, yang tidak sudi djika nasib Aldjazair diserahkan kepada rakyat Aldjazair sendiri. Perundingan² antara perutusan² Pemerintah Sementara Republik Aldjazair dan Pemerintah Perantjis, yang berachir tanggal 18 Maret 1962, menghasilkan persetujuan mengenai gentjatan sendjata, yang praktis bagi pelaksanaan self-determinasi

dan hubungan² lebih lanjut antara kedua negara. Dengan demikian salah satu dari peperangan kemerdekaan yang paling sengit telah berachir dan terbukalah djalan menuju Aldjazair yang tjinta-damai, merdeka dan berdaulat.

Persetudjuan² Evian itu mentjakup soal² gentjatan sendjata, penarikan kembali pasukan² Perantjis dari Aldjazair, pemindahan pangkalan² militer, pengakuan dalam prinsip integritas Aldjazair, termasuk Sahara, mengenai persamaan dalam kerdjasama antara kedua negara dalam soal pengolahan minyak Sahara dan dalam soal pendjualannya.

Tanggal 1 Djuli referendum diadakan dan hasilnya lebih dari 70 prosen menghendaki Aldjazair merdeka dan tetap mempunyai hubungan kerdjasama dengan Perantjis. Sementara itu Perdana Menteri Youssef Ben Khedha digantikan oleh Mohamad Ben Bella.

Hasil² pertaniannya ialah gandum, djelai, padi, djagung, kentang, tembakau, sajian dan rami. Buah korma, ara dan delima berlimpah². Djuga terdapat tambang besi, minyak, seng, belerang, tembaga, automoni dan timah hitam. Produksi industrinja tiap tahun diperkirakan mempunyai nilai 445 djuta dollar.

Jang menggulingkan.

Sebagai tambahan perlu ditjatat kedjadian terakhir menjelang dibukanya Konperensi Bandung II dikota Aldjazair bulan Djuni ini, jaitu penggantian pemerintahan oleh Houari Boumedienne, Wakil Ketua I Dewan Menteri merangkap Menteri Pertahanan Nasional dan anggota Biro Politik FLN, atas Ben Bella. Penggantian Pemerintahan ini ternyata menjadi salah satu faktor yang menjebabkan ditundanya KAA II itu sampai bulan Nopember nanti, dengan tetap mengambil tempat di Aldjazair. Penundaan ini dapat kita anggap sebagai salah satu resiko perjuangan dari rakyat² Afrika-Asia dalam menumpas imperialisme didunia.

Houari Boumedienne dilahirkan di Guelma (Aldjazair) tahun 1925. Ia berpendidikan Universitas Tunis dan Kairo. Ketika masih sebagai guru muda dalam mata pelajaran bahasa Arab, ia telah aktif dalam perjuangan revolusioner dari bangsanja. Ber-sama² dengan rekan² lainnya, ia mempersiapkan pemberontakan bersendjata melawan Perantjis. Dari tahun 1955 ia turut serta setjara langsung dalam perang pembebasan nasional, dan memegang peranan sebagai komandan detasemen tentara gerilja yang melakukan operasinya di daerah Oran tahun 1957. Ia naik pangkat menjadi kolonel.

Bulan Maret 1960 ia ditunjuk sebagai kepala staf tentara FLN dan segera setelah itu dipilih sebagai anggota dari Dewan Nasional Revolusioner

Bersambung ke halaman 32.

Kerdjasama Ekonomi

Antar Negara New Emerging Forces

Motto : *Filsafah ekonomiku adalah "heaven storming revolutionary spirit, combined with down to earth handling of problems as they arise".*
(Amanat Berdikart).

I. KATA PENGANTAR :

Menjongsong diselenggarakannya Konperensi Afrika-Asia ke-II di Aldjazair, maka atas inisiatip (Departemen) Urusan Perdagangan Luar Negeri telah diusahakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan Konsepsi² dalam bidang kerdjasama ekonomi antarnegara NEFO jang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk Delegasi Indonesia ke Konperensi tersebut.

Pemikiran jang dirumuskan itu adalah hasil karya dari suatu Team Kerdja Interdepartemental jang diadakan dengan prakarsa dari (Departemen) Urusan Perdagangan Luar Negeri dan para anggotanya jang mewakili Departemen² : Luar Negeri, Pertanian, Urusan Bank Sentral, P3, Perkebunan, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, Kehutanan, Perindustrian Dasar, Perindustrian Rakjat dan dari BAPPENAS.

Oleh sementara anggota dan dalam waktu jang singkat telah disusun kertas² karya jang memaparkan latar belakang dan motivering mengenai perlunya ada kerdjasama antarnegara NEFO dalam tiap² aspek perekonomian jang mendjadi tugas dan wewenang Departemen²/anggota Team Kerdja tersebut.

Berdasarkan kertas² karya tersebut serta setelah diadakan musjawarah dan diskusi, maka jang dimuat berikut ini, adalah hasil karya dari Team Kerdja Interdepartemental termaksud jang mengutamakan suatu konsepsi jang konkrit dan workable dalam bidang kerdjasama ekonomi antarnegara New Emerging Forces.

Dari Laporan Delegasi Indonesia ke Sidang ke VII Standing Committee Afrika-Asia (Bagian Ekonomi) pada tanggal 4-8 Djuni 1965 di Aldjazair kita sama mengetahui, bahwa idee²/konsepsi² pokok jang merupakan hasil karya Team Kerdja tersebut mendapat sambutan jang positif seraja diterima oleh forum tersebut.

II. LATAR BELAKANG :

A. Adalah mendjadi suatu kenyataan, bahwa Negara² Afro-Asia meskipun sebagian besar kini telah mentjapai kemerdekaan, tetapi pada hakekatnya belum mentjapai kemerdekaan sepenuhnya, karena ekonomis masih sangat tergantung kepada negara² Oldefo jang kini memiliki dan menguasai produksi, perdagangan internasional, keuangan dan communications (chususnja perhubungan laut).

Tragik daripada ini, ialah, bahwa daerah Afrika-Asia jang merupakan produsen terbesar daripada primary commodities, antara lain : 95% daripada produksi dunia akan karet alam, 95% daripada produksi dunia akan teh, 90% daripada produksi dunia akan kopra, tidak dapat dinikmati kedudukannya sebagai demikian, karena dominasi asing (Barat) pada bidang dimaksud diatas.

B. Badan² Internasional seperti P.B.B. dan agencies-nja, jang sampai kini dihandalkan oleh Negara² Berkembang, ternyata tidak dapat memberikan djaminan bagi perkembangan ekonominya dan memperlantjar pembangunannya. Badan² itu ternyata tidak dapat memberikan djaminan untuk menutup "the ever widening gap", jaitu disparitas jang makin membesar antara taraf penghidupan negara industri (Oldefo) dan Negara² Berkembang (Nefo). Bahkan badan² ini didominasi oleh negara² industri untuk mengabdikan kepada kepentingan²nja.

C. Keadaan jang tidak seimbang ini, adalah sebagai suatu akibat daripada imperialisme dan kolonialisme terhadap Negara² A-A selama abad terakhir, dimana negara² tersebut meskipun kemudian memperoleh kemerdekaan politisnya, namun praktis semuanya menghadapi masalah jang sangat dengan terbatasnya dana², pengetahuan tehnik dan managerial know how.

Djelaskan, bahwa masalah² jang dihadapi oleh Negara² Nefo disalah gunakan oleh negara² industri untuk melakukan politik neokolonialisme pada bidang ekonomi dan pembangunan terhadap negara baru ini.

D. Dalam hubungan ini, harus diinsjafi, bahwa "heterogeniteit" jang merupakan tjiri khas bagi kelompok Negara² A-A, adalah suatu handicap jang mutlak harus diatasi.

"Heterogeniteit" pada bidang politik dan militer dengan adanya pertalian² (neokolonialisme) dalam bidang politik dan militer antara kelompok² Negara A-A dengan pihak Oldefo;

"Heterogeniteit" pada bidang ekonomi dengan adanya pertalian² dalam bidang ekonomi antara kelompok² Negara A-A dengan pihak Oldefo;

"Heterogeniteit" pada bidang kebudayaan merupakan rintangan utama, jang hanya dapat diatasi pertama-tama dengan memupuk rasa solidaritas jang kuat dengan adanya "homogeniteit" dalam kehidupan politik untuk kemudian disusul dengan "homogeniteit" dalam bidang ekonomi dan lain-lainnya.

III. PRINSIP DASAR :

A. Dalam rangka mengisi kemerdekaan nasional yang bebas daripada ketergantungan ekonomis, satu-dua jalan, ialah dengan merombak struktur ekonomi yang ada sekarang ini, dengan memajukan "the life line of imperialism" dan menggantinya dengan struktur baru, jaitu "BERDIKARI" bagi Negara² A-A yang didasarkan atas landasan baru, sesuai dengan kepentingan nasional dari Negara² Nefo.

Dan dengan demikian tiada jalan lain pula daripada mengerahkan segala dana dan tenaga yang terdapat di Negara² Nefo umumnya dan Negara² A-A khususnya, berdasarkan kerdjasama atas hak yang sama dan saling hormat menghormati.

B. Mengingat adanya "inter relationship" yang erat antara unsur perdagangan internasional, custom procedures, communication dan finance, sehingga keempat unsur tersebut merupakan satu satuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, maka setjara prinsipil, masalah foreign trade harus dibahas dalam scope keempat unsur tersebut.

C. Maka dengan demikian, sampailah pada kesimpulan, bahwa berhubung hal² yang tersebut diatas, urgent sekali untuk memperjuangkan pada Konferensi A-A ke II yang akan datang, pembentukan suatu "MACHINERY" tetap, yang beranggotakan Negara² Afro-Asia untuk membahas, mempelajari dan mengatur usaha² untuk mengembangkan ekonomi dan pembangunan di Negara² Afrika dan Asia.

"Machinery" tersebut merupakan suatu badan tunggal untuk melaksanakan tugas² seperti tersebut diatas dan berorganisasikan pada tingkat nasional, regional dan internasional.

IV. SISTEM KERDJASAMA :

Adapun "machinery" tetap itu, harus dapat menjangkau pembahasan, study dan usaha² pada bidang keempat unsur :

- A. foreign trade,
- B. custom procedures,
- C. communication dan
- D. finance,

seperti telah dibahas dalam hal² sebelumnya kertas² manja dari pelbagai instansi/Departemen setjara terperinci, adalah sebagai berikut :

A. Bidang Perdagangan Internasional :

- 1) Mengatur/membentuk/mengimplementasikan :
 - (a) Producers alliance dikalangan Negara² A.-A.
 - (b) Consumers alliance dikalangan Negara² A.-A.
- 2) Mengatur/membentuk/mengimplementasikan Purchase and Sales Arrangements (djika perlu bersifat long-term).
- 3) Merumuskan/mengimplementasikan Trading Rules pada umumnya.

(4) Penentuan Export Quota dan Export Control.

(5) Coordination of Production :

- (a) Up-grading,
 - (b) Standardization d.l.l.
- #### (6) Coordination of Co-operation :
- (a) Sub Regional Organizations,
 - (b) Production Sharing, Joint Enterprise d.l.l.
- #### (7) Coordination of Research and Planning termasuk Exchange of Technical Know How antara lain Up-grading Managerial Know How d.l.s.b.
- #### (8) Mengatur penggunaan fasilitas yang dapat diberikan oleh Free Trade Areas yang telah dan akan dibentuk didaerah Afrika-Asia/Bonded Warehouse.

B. Custom Procedures :

- (1) Mengadakan preferential tariffs (custom tariffs) yang berlaku bagi barang² yang diperdagangkan antara Negara² Afrika-Asia sendiri.
- (2) Melanjutkan perjuangannya penurunan/penghapusan tarif dipasaran dunia bagi primary commodities, semi-manufactures dan manufactures yang berasal dari Negara² Berkembang.
- (3) Penjederhanaan dan standarisasi daripada Custom Formalities di Negara² A-A.
- (4) Standarisasi daripada Statistics.
- (5) Exchange of Technical Know How :
 - (a) Tentang hal Custom Formalities.
 - (b) Penafsiran peraturan² d.l.l.
- (6) Kerdjasama pada Bidang Pemberantasan Penjelundupan.

C. Communications :

(a) Sea-Communications :

- (1) Pembentukan armada Niaga Nasional untuk mengedjar/menutup shipping gap dan mematahkan dominasi Oldefo dalam djaring² pelajaran internasional.
- (2) Mengatur pemberian kredit dalam rangka pembangunan Armada Niaga Nasional oleh Negara² yang industrinya telah maju di Benua Afrika dan Asia, dimana djangka waktu dan besarnya bunga disesuaikan dengan kemampuan keuangan dari Negara² penerima bantuan, disamping mengadakan pooling daripada national resources, baik pada bidang keuangan dan dana², maupun pada bidang alat² pengangkutan laut dan tenaga² ahli maritim.
- (3) Mengadakan combined action terhadap Freight Conferences, agar bentuk yang ada, dirombak dan diberi landasan baru, dimana Pemerintah dari Negara² A-A yang berkepentingan merupakan satu²nja autoriteit yang berhak untuk menentukan antara lain besarnya freight rates dan djumlah sailings.

Bersambung ke halaman 22.

PEMBENTUKAN DAN PENUNDJUKAN PERWAKILAN DALAM NEGERI DAN URUSAN LUAR NEGERI

Dalam rangka menudju kearah dekonsentrasi, maka dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Industri dan Menteri Dalam Negeri dan Urusan Umum

April 1965 ditetapkan pembentukan Perwakilan Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perindustri dan Perdagangan Luar Negeri. Adapun susunan organisasi Perwakilan tersebut terdiri dari :

1. Kepala Perwakilan.
2. Kepala Bagian Perdagangan Dalam Negeri.
3. Kepala Bagian Perdagangan Luar Negeri.
4. Sekretariat Umum.
5. Kepala Seksi Ekspor.

Sebagai realisasi dari Surat Keputusan Bersama tersebut diatas, oleh Menteri Perdagangan dan Industri dan Menteri Dalam Negeri dan Urusan Perindustri dan Perdagangan Luar Negeri telah ditetapkan pembentukan Perwakilan-Perwakilan Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perindustri dan Perdagangan Luar Negeri.

Dibawah ini kami sadjikan Daftar Perwakilan Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perindustri dan Perdagangan Luar Negeri.

Perlu dikemukakan disini bahwa pada beberapa Perwakilan tertentu, Kepala Bagian Perdagangan Dalam Negeri dan Kepala Seksi Ekspor sementara dirangkap oleh Kepala Perwakilan/Bagian Perdagangan Dalam Negeri dan Urusan Perindustri dan Perdagangan Luar Negeri.

DAFTAR PEMBENTUKAN

No. urut	Daerah Tingkat I	T e m p a t Kedudukan	Kepala Perwakilan
1.	A t j e h	Banda Atjeh	Drs M. Asjk A
2.	Sumatra Utara	M e d a n	Sungkono
3.	Sumatra Barat	P a d a n g	Almunir
4.	R i a u	Pekanbaru	Zainal Abidin
5.	D j a m b i	Telanaipura	Abu Chamid
6.	Sumatra Selatan	Palembang	Basrul Djamal
7.	L a m p u n g	Telukbetung	Drs Human Ha
8.	Djakarta Raya	Djakarta	Drs J.B. Ririhe
9.	Djawa Barat	Bandung	K. Sumiratmad
10.	Djawa Tengah	Semarang	Ir Hardjono
11.	Djawa Timur	Surabaya	R. Sanjoto
12.	Kalimantan Selatan	Bandjarmasin	Drs Sjahmarda
13.	Kalimantan T.mur	Samarinda	Burhan Nasuti
14.	Kalimantan Tengah	Palangkaraja	Ferdi Umar
15.	Kalimantan Barat	Pontianak	R.M. Soedarto
16.	Sulawesi Selatan	Makasar	Drs Trisasono
17.	Sulawesi Tenggara	Kendari	A.B. Amirudin
18.	Sulawesi Tengah	P a l u	Abid n Ma'ruf
19.	Sulawesi Utara	Manado	Drs S.L.Tobing
20.	B a l i	Denpasar	Ir M. Suwardi
21.	Nusa Tenggara Barat	Mataram	S. Dibjosusanto
22.	Nusa Tenggara Timur	Kupang	Ibrahim b. Talib
23.	M a l u k u	A m b o n	Ir Abdullah L
24.	Jogjakarta	Jogjakarta	R.J. Sukarjo

*) Dirangkap oleh Kepala Perwakilan

***) Perobahan keputusan: tanggal 14 Djuli 1965

— Keputusan² Menteri mulai berlaku tanggal 24 Djuni 1965.

PERWAKILAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN DAGANGAN LUAR NEGERI

Dalam Negeri dan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 030/MPDN/SK/65 tertanggal 26
027/4/MPLN/SK/65

Negeri ditiap-tiap Ibukota Daerah Tingkat I diseluruh Indonesia. (Lihat WP No. 1)

ala Seksi Marketing dan Research.

ala Seksi Impor.

ala Seksi Harga.

ala Seksi Metrologi.

ala Seksi Pengadaan dan Penjaluran.

Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri BRIGDJEN A. JUSUF dengan Keputusan-Keputusannya
k tiap-tiap Daerah Tingkat I diseluruh Indonesia berikut Pedjabat-Pedjabat (Personalia Perwakilan).
uar Negeri beserta nama Kepala Perwakilan, Kepala Bagian Perdagangan Dalam Negeri dan Kepala

ri dan/atau Kepala Bagian Perdagangan Luar Negeri dirangkap oleh Kepala Perwakilan; begitu pula
dagangan Luar Negeri dan/atau Seksi lainnya.

PERSONALIA PERWAKILAN

Kepala Bagian Perdagangan Dalam Negeri	Kepala Bagian Perdagangan Luar Negeri	Keputusan Menteri Perda- gangan Dalam Negeri No. .../MPDN/SK/65
Abdullah Azmi B.A.	S.M. Sinaga	No : 064/MPDN/SK/65
Abdu Malik	James Nasution	065/MPDN/SK/65
Achmad Mochtar	Almunir *	066/MPDN/SK/65
Djumari Ali	W.T.O. Hutagalung	067/MPDN/SK/65
Daud Makruf	Drs K.A. Tambunan	068/MPDN/SK/65
Drs Napitupulu	Amir T. S.mangunsong	069/MPDN/SK/65
Drs P. Nainggolan	Nawawi Glr. Rd. Wilwo	070/MPDN/SK/65
Drs Azhari	Drs R. Soejadi	071/MPDN/SK/65
Didi Marsidi	Tazir	072/MPDN/SK/65
R. Soedjalmo	Soewarno	073/MPDN/SK/65
Pramono	R. Djokowaluyo	074/MPDN/SK/65
Djuli Abdul Sani	A. Madjid	075/MPDN/SK/65
Burhan Nasution *	Sudijono S.H.	076/MPDN/SK/65
Ferdi Umar *	Moh. Hoesni	077/MPDN/SK/65
B.E. Pohan B.A. **	R. Hanafiah	078 & 096
Ismu Suwanto	G.C.C. Imbar	079/MPDN/SK/65
A.B. Amirudin *	J.K. Kairupan	080/MPDN/SK/65
Abidin Ma'ruf S.H. *	Hasan Basri	081/MPDN/SK/65
J.A. Sangari	Drs A.N. Pantow	082/MPDN/SK/65
Drs Putu Sunakha	Wenten Semadhi	083/MPDN/SK/65
Imam Sutoto B.Sc.	G. Widharto	084/MPDN/SK/65
Tigor Gultom B.A.	Patty	085/MPDN/SK/65
A.J. Schuslawane	Ir Abdullah Lumaela *	086/MPDN/SK/65
Tirtosudijono	Sirjono	087/MPDN/SK/65

Sambungan halaman 19.

- (4) Mengadakan perdjandjian bilateral atau multilateral antara Negara² A-A dalam bidang pelajaran, antara lain untuk mengadakan pelajaran tetap dan teratur antara Negara² A-A. Untuk melaksanakan maksud ini, perlu diadakan pemusatan freight pooling dan penentuan freight rate bersama.
 - (5) Exchange of Technical Know How jang meliputi :
 - Research pada bidang shipping economics, pembangunan perkapalan, kepela-buhanan dan perkembangan maritim.
 - Shipping Policies serta implementasi-nja, termasuk State Protection, Preferential Treatment dan lain² Promotional Methods.
 - Penukaran ahli² dan trainees pada bidang maritim.
- (b) **Air-Communications :**
- (1) Preferential Treatments berupa Traffic Rights dan Landing Facilities.
 - (2) Pengaturan airlines antar Negara A-A untuk menghindarkan competition jang tidak sehat serta arrangements dibidang teknis dan komersial.
 - (3) Exchange of Technical Know How jang meliputi :

- Penukaran ahli² dan trainees dibidang penerbangan sipil.
- Penukaran information dan experience dalam usaha mentjapai penerbangan komersial jang setjara ekonomis dapat dipertanggung djawabkan.

D. Finance :

- (1) Mengadakan Multiple Payment Arrangement jang berdasarkan Multiple Clearing System di antara Negara² A-A, jang merupakan alat pelengkap untuk mengembangkan perdagangan luar negeri dari Negara² A-A :
 - Pemberian kredit untuk djangka waktu pendek.
 - Pembentukan suatu Afro-Asian currency unit.
- (2) Pembentukan Afro-Asian Development Bank dapat dilaksanakan, sesudah Multiple Payment Arrangement tersebut telah berdjalan dengan lantjar.
- (3) Tindakan² follow-up untuk mengisi persetudjuaan jang telah ditjapai untuk mendirikan suatu Federation of Afro-Asian Insurers dan Re-insurers (Cairo, tanggal 3 s/d 5 September 1964), menggantikan peranan dari perusahaan² asuransi internasional, seperti : Lloyds' of London dan American Insurance Underwriters.

Djakarta, 11 Djuni 1965

PERSEROAN DAGANG & INDUSTRI

"MARISON" N.V.

("MARISON" TRADING & INDUSTRIAL CORPORATION LTD.)

KANTOR PUSAT : Djl. Kopi 18A
Tel. O.K. 21595
Djakarta-Kota

K. P. EKSPOR : Djl. Nusantara 38B (atas)
Tel. O.G. 47314
Djakarta

KANTOR² TJABANG

BANDUNG
Djl. Braga 39A
Tel. 5395.

MEDAN
Djl. Kebudajaan 15A
Tel. 24617 & 24395.

SIBOLGA
Djl. Thamrin 67
Tel. 28.

TELUKBETUNG
Waylajap
Gedong Tataan
Tel. Tataan 17.

Alamat kawat : MARISON

KODE : Bentley's Second & Acme

Impor : Tekstil & Rajon, Benang Tenun & Bahan Batik, Tali Rami & Karung Goni, Bahan² Kimia, Bahan² Bangunan, Keperluan Merokok & Barang-Barang Klontong.

Ekspor : Karet, Kaju, dan Barang² Ekspor lainnja.

Industri : Kilang Getah, Penggilingan Padi & Penebangan kaju.

Korespondensi : Seluruh Dunia.

Bank : BANK INDONESIA, BANK NEGARA INDONESIA, BANK DAGANG NASIONAL INDONESIA, SEDJAHTERA BANK UMUM.

Anda ingin SUKSES dalam Perdagangan ?

Datangilah

P.N. PEMBANGUNAN NIAGA



**Aparat Revolusi dalam
bidang perdagangan :**

IMPOR

EKSPOR

KONTRAKTOR

PROJEK dan INDUSTRI

Untuk suksesnja usaha anda, harap berhubungan dengan :

P.N. PEMBANGUNAN NIAGA

Division² :

1. IMPOR BAHAN BANGUNAN
2. IMPOR ALAT² BESAR/MESIN²
3. IMPOR MESIN² SANDANG

Alamat :

**Djl. Hajam Wuruk no. 127.
D J A K A R T A**

Division² :

1. IMPOR SANDANG PANGAN
2. IMPOR BAHAN² CHEMICALIEN/PHARMASI
3. E K S P O R

Alamat :

**Djl. Gadjah Mada no. 18.
D J A K A R T A**

Surat Pendorong Produksi (S.P.P.)

Surat Keputusan Bersama Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Perdagangan/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. Kep. 57/UBS/65 tertanggal 12 Djuli 1965.

MENTERI URUSAN BANK SENTRAL DAN MENTERI PERDAGANGAN/KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI;

Menimbang :

Bahwa dianggap perlu untuk menjempurnakan lebih lanjut tudjuan penggunaan S.P.P.

Memperhatikan :

Kep. No. 23-24/UBS/64 tanggal 22 April 1964 dan No. Kep. 35/UBS/65 tanggal 10 Mei 1965.

Mengingat :

Peraturan Presiden R.I. No. 13 Tahun 1964 pasal 4.

M E M U T U S K A N :

Pasal 1.

Mulai pada hari Bursa jang pertama terhitung dari tanggal penetapan Surat Keputusan Bersama ini, dan untuk selanjutnja, jang diperkenankan untuk membeli S.P.P. di Bursa hanja Produsen Importir (Perusahaan² jang boleh mengimpor sendiri) jang telah mempunyai angka Pengenal jang bersangkutan.

Pasal 2.

Sehubungan dengan pasal 1 diatas maka pengimporan barang² atas dasar S.P.P. hanja dapat dilakukan oleh :

- Produsen Importir seperti jang dimaksud dalam pasal 1 diatas jang telah memperoleh S.P.P. atas namanja sendiri, dengan pembelian melalui Bursa.
- Produsen-Eksportir atas dasar S.P.P. jang dihasilkan oleh Perusahaannja sendiri.
- Pembukaan L/C untuk impor harus disalurkan melalui Bank Indonesia/Bank Indonesia „Urusan K.T.N., dan/atau Tjabang²nja.

Pasal 3.

Mulai dari tanggal penetapan Surat Keputusan Bersama ini tiap² S.P.P. jang dihasilkan oleh Eksportir Bukan Produsen harus didjual melalui Bursa di Djakarta. Demikian pula S.P.P. jang dihasilkan oleh Produsen-Eksportir akan tetapi tidak digunakan olehnja harus didjual melalui Bursa Djakarta.

Pasal 4.

Mulai tanggal ketentuan Surat Keputusan Bersama ini :

- Barang² jang diperkenankan untuk diimpor oleh importir sebagai jang dimaksud dalam pasal 1 diatas adalah djenis² barang jang diperlukan untuk unit²nja sendiri.
- Sehubungan dengan ketentuan sub a dari pasal ini maka Pernyataan Impor (P.I.) jang bersangkutan dapat langsung diajukan kepada masing² Bank Devisa untuk pembukaan L/C.
- Tembusan² P.I. harus disampaikan pula kepada BLLD Direktorat Impor/Departemen Perdagangan dan Departemen dibawah mana Importir jang bersangkutan bernaung.

Pasal 5.

Pelanggaran² terhadap ketentuan² dalam pasal 4 sub a mengakibatkan bahwa importir jang bersangkutan akan ditjabut Angka Pengenalnja.

Pasal 6.

Peraturan² lain mengenai S.P.P. sekedar tidak bertentangan dengan peraturan ini, tetap berlaku. Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Surat Keputusan Bersama ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

MENTERI PERDAGANGAN/KUASA
MENTERI URUSAN PERDAGANGAN
LUAR NEGERI

ttd.
ACHMAD JUSUF.

Ditetapkan : di Djakarta
pada tanggal: 12 Djuli 1965
MENTERI URUSAN BANK SENTRAL

ttd.
JUSUF MUDA DALAM.

KETENTUAN PELAKSANAAN :

S.K. BERSAMA MENTERI URUSAN BANK SENTRAL DAN MENTERI PERDAGANGAN/ KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI No. KEP. 57/UBS/65.

Sebagai follow-up dari Surat Keputusan Bersama Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Perdagangan/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. Kep. 57/UBS/65 tanggal 12 Djuli 65, maka Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa telah mengeluarkan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya dengan Pengumuman-Pengumumannya tanggal 16 Djuli 1965 No. 3/Eks/BLLD/65 dan No. 16/IMP/BLLD/65.

I. PRODUSEN - EKSPORTIR.

Sambil menundjuk pada Pengumuman Pimpinan LAAPLN No. 38 tanggal 30 April 1964 jo No. 63 tanggal 18 Agustus 1964 dan Pengumuman Biro Lalu Lintas Devisa No. 2/Eks/BLLD/65 tanggal 10 Mei 1965 ditetapkan ketentuan² pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pasal 3 dari Surat Keputusan Bersama tersebut diatas harus diartikan bahwa S.P.P. yang diterima oleh Ekspertir bukan produsen berdasarkan Schedule of Remittance tanggal 12 Djuli 1965 dan berikutnya tidak lagi olehnya dapat digunakan untuk impor sendiri akan tetapi harus dijual melalui Bursa di Djakarta.

2. Dengan demikian maka S.P.P. yang berasal dari Schedule of Remittance yang tertanggal 11 Djuli 1965 dan sebelumnya masih dipergunakan digunakan untuk impor oleh yang namanja tertjantung pada S.P.P. tersebut menurut prosedur yang ditentukan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Perdagangan/Kuasa Menteri Perdagangan luar Negeri No. Kep. 35/UBS/'65 tgl. 10 Mei 1965 jo. Pengumuman BLLD No. 9/Imp/BLLD/65 tgl. 13 Mei 1965.

3. Untuk memudahkan penelitiannya maka; mulai dengan S.P.P. tanggal 12 Djuli 1965 yang dikeluarkan untuk Ekspertir Produsen, Bank Devisa diminta untuk membubuhi tjap „Ekspertir Produsen” pada S.P.P. yang bersangkutan.

4. Ketentuan² Surat Keputusan Bersama tersebut diatas beserta ketentuan² pelaksanaannya tidak berlaku terhadap S.P.P. Tambahan, yang tetap mengikuti ketentuan sebagaimana tertjantung dalam pasal 6 dari Pengumuman Biro Lalu Lintas Devisa No. 2/Eks/BLLD/65 tanggal 10 Mei 1965.

II. PRODUSEN - IMPORTIR.

Sambil menundjuk pada Pengumuman L.A.A. L.N. No. 41 tanggal 30 April 1964, Pengumuman Biro Lalu Lintas Devisa No. 9/Imp/BLLD/65 tanggal 13 Mei 1965 jo. No. 3/Eks/BLLD/65 tanggal 16 Djuli 1965 ditetapkan ketentuan² pelaksanaan sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan „Produsen-Importir” pada pasal 1 Surat Keputusan Bersama tersebut diatas adalah perusahaan² yang mengimpor sendiri dan untuk itu telah mendapat pengakuan dari Departemen Perdagangan dan angka pengenal dari BLLD (dahulu disebut „Zelfimporterende bedrijven”).

2. Oleh karena ketentuan² Surat Keputusan Bersama tersebut diatas baru berlaku terhadap S.P.P. berdasarkan Schedule of Remittance tanggal 12 Djuli 1965 dan berikutnya, maka impor dengan S.P.P. berdasarkan Schedule of Remittance tanggal 11 Djuli 1965 dan sebelumnya, termasuk S.P.P. Bursa tgl. 13 Djuli 1965 dan sebelumnya, tetap mengikuti ketentuan² lama sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Bersama Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Perdagangan/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. Kep. 35/UBS/65 tanggal 10 Mei 1965 beserta ketentuan² pelaksanaannya yang tertjantung dalam Pengumuman Biro Lalu Lintas Devisa No. 2/Eks/BLLD/65 dan No. 9/Imp/BLLD/65 masing² tanggal 10 dan 13 Mei 1965.

3. Berhubung dengan ketentuan² yang tertjantung dalam pasal 4 Surat Keputusan Bersama tersebut diatas maka :

a. Para Produsen-Importir dan Ekspertir Produsen diminta selekas mungkin menjampai kepada instansi² yang tersebut pada ayat 4 c dari Surat Keputusan Bersama tersebut suatu daftar dari djenis² barang yang diperlukan untuk unitnja sendiri dengan tjatatan, bahwa djenis² barang tersebut tidak boleh menjimpang dari djenis² yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktorat Import, Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri 246/Kep. Dim/65 tanggal 17 Mei 1965 jo No. 252/Kep. D'im/65 tanggal 18 Mei 1965 dan mengingat bagi Importir yang bersangkutan.

b. P.I.-P.I. berdasarkan S.P.P. tanggal 12 Djuli 1965 dan berikutnya tidak lagi memerlukan pengesahan tentang djenis dan golongan oleh B.L.L.D. lebih dahulu melainkan dapat langsung diadjudkan kepada Bank untuk pembukaan L/C.

Akan tetapi BLLD, Direktorat Impor Departemen Perdagangan dan Departemen dimana Importir yang bersangkutan bernaung akan mengadakan pemeriksaan terhadap P.I.-P.I. yang tembusannya disampaikan kepadanya oleh Bank setjara repressif dengan sanksi sebagaimana tertjantung pada pasal 5 Surat Keputusan Bersama tersebut diatas.

EKSPOR HASIL BUMI RIAU KEPULAUAN DIBERIKAN TAMBAHAN SPP 10%

KEPUTUSAN BERSAMA

KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAN MENTERI URUSAN BANK SENTRAL
No. Kep. 60/UBS/65

KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI
DAN
MENTERI URUSAN BANK SENTRAL

- Menimbang** :
- bahwa dengan surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Urusan Bank Sentral No. Kep. 40/UBS/64 tertanggal 21 Djuli 1964 diberikan S.P.P. tambahan sebagai bantuan peralihan untuk daerah ex-konsinjasi counter-import;
 - bahwa kebutuhan akan bantuan itu lebih-lebih terasa untuk daerah Tingkat II Kepulauan Riau yang tadinja mempunjai status "karantina moneter" dan kemudian dimasukkan dalam daerah Rupiah;
 - bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada sub a & b, maka perlu pula terhadap ekspor Daerah Tingkat II Kepulauan Riau diberikan S.P.P. Tambahan sebesar 10%;
- Mengingat** :
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 1964;
 - Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Urusan Bank Sentral No. Kep. 40/UBS/64 tertanggal 21 Djuli 1964.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Kepada Eksportir jang melaksanakan ekspor hasil bumi jang dihasilkan oleh Daerah Tingkat II Kepulauan Riau diberikan S.P.P. Tambahan sebesar 10%.
- Kedua** : Ketentuan-ketentuan lain mengenai S.P.P. tambahan seperti diatur dalam surat-surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Urusan Bank Sentral No. Kep. 40/UBS/64 tertanggal 21 Djuli 1964 dan No. Kep. 62/UBS/64 tertanggal 23 September 1964, berlaku pula terhadap S.P.P. Tambahan tersebut pada pasal Pertama.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.—

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 16 Djuli 1965.

MENTERI URUSAN BANK SENTRAL,

ttd.

(JUSUF MUDA DALAM).

KUASA MENTERI PERDAGANGAN
LUAR NEGERI,

ttd.

(A. J U S U F)

Brigdjen T.N.I.

* Sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama tersebut diatas, maka Kepala Direktorat Ekspor dengan S.K. No. 2969/KD/DEK/65 tgl. 16-7-1965 telah menetapkan hasil² bumi/laut/barang jang dihasilkan Dati II Kepulauan Riau jang diberikan SPP Tambahan 10%.

Disamping itu bertalian pula dengan hal diatas Panglima Kesatuan Operasi I KOTOE, telah mengeluarkan Keputusan No. 021/Ko-I/1965 jang ketentuan²nja dimuat pada halaman 37 madjalah ini.

SAVE YOUR FOREIGN EXCHANGE

on EXPORTS of: **commodities** rubber, tea, coffee, spices etc.
raw materials copra, raw sugar etc.
minerals

avoid claims and manipulations on weight and/or quality.

our **CERTIFICATE of INSPECTIONS** is accepted in international trade!

for **TRUSTWORTHY and IMPARTIAL INSPECTIONS** of your goods
use the services of:

**SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA, Ltd.
(S. C. I.)**

head office :
djl. palatehan I blok K V/31 kebjoran
phone : 70036 p.o. box 2377

d j a k a r t a

branch/agent :
in all main ports of indonesia

as affiliate company of the world-wide organization of

GENERAL SUPERINTENDENCE COMPANY Ltd., GENEVA
(Société Générale De Surveillance S.A.)

recommended by the

Department of Trade of the Republic of Indonesia

„Pengawasan dan Penilaian“

(4)

A. 1. Arti dan Tujuan :

Suatu Rentjana Pembangunan, didalam pelaksanaannya tidak akan terlepas dari berbagai matjam halangan dan rintangan apalagi djika rentjana tersebut bersifat nasional.

Hal² yang menimbulkan berbagai kesukaran itu dalam garis besarnya dapatlah dibedakan atas 2 matjam, jaitu.

1. faktor² yang berada didalam bidang ekonomi yang sedang dibangun (internal economic factors).
2. faktor² yang berada diluar bidang tersebut (external economic factors).

Oleh karena demikian, dengan tujuan memelihara kelantjaran pembangunan, agar dapat mentjapainja sesuai dengan rentjana yang sudah ditetapkan, serta kontinuita pembangunan dapat terpelihara dengan baik dan harmonis, baik mengenai pembangunan sektoral maupun pembangunan projek² maka diperlukan suatu pengawasan dan penilaian yang seksama.

Pengawasan dan penilaian ini terutama ditujukan terhadap faktor² yang bersifat internal dengan tidak mengabaikan faktor² externalnja.

Dengan demikian, maka tidak sadja tingkat kelantjaran proses pembangunan dapat dipelihara, tetapi dapat pula memberikan dorongan dan bimbingan untuk mentjapai tudjuannya dengan baik.

2. Tugas dan Kewajiban :

Tugas dari Badan Pengawasan dan Penilaian dalam usaha mentjapai tujuan pembangunan dapatlah dibedakan sbb :

- a. mendjaga agar tudjuan pembangunan dapat ditjapai sesuai dengan rentjana, sehingga kemungkinan² penjelewengan dapat dihindarkan atau penjelewengan² tidak akan berulang.
- b. melakukan pengawasan dan penilaian terhadap usaha pembangunan yang sudah mulai dilaksanakan, baik berdasarkan laporan² yang diterima, maupun berdasarkan penjelidikan² sendiri.
- c. setjara teratur menjampaikan progress report dari hasil pengawasan dan penilaiannya kepada yang berwenang yang berarti djuga menjampaikan pertanggungjawaban dari pada hasil pekerdjaannya.
- d. menjampaikan saran² kepada para pelaksana dan kepada yang berwenang mengenai usaha² atau kebidjaksanaan untuk :
 - a). memperlantjar usaha pembangunan.
 - b). mengatasi kesukaran².

3. Matjam pengawasan dan penilaian :

Pengawasan dan penilaian dapat dibedakan dalam berbagai matjam a.l. :

1. preventif dan repressif
 2. intern dan extern
 3. umum dan khusus
 4. horizontal dan vertikal
 5. politis, ekonomis, sosial dan technis.
- yang masing²nja saling berhubungan.

Dalam penggunaannya, kelima atau beberapa matjam itu dapat digabungkan, sesuai dengan tudjuan yang hendak ditjapai.

B. Pedoman Umum :

Pengawasan dan penilaian memerlukan pedoman umum dalam pelaksanaannya, yang dalam garis besarnya dapat dikemukakan sbb. :

1. pengawasan dan penilaian dimulai dengan mempelajari rentjana overall dan rentjana tahap demi setahap tertentu.
Bila bagian pengawasan dan penilaian menganggap perlu untuk mengadakan saran² untuk kesempurnaan rentjana² tersebut maka hal itu dapat dilakukannya, baik sebelum, maupun setelah rentjana itu mulai dilaksanakan.
2. setiap rentjana hendaklah dengan djelas memuat djangka waktu penjelesaiannya, serta matjam, djumlah dan sjarat² penggunaan faktor produksi yang diperlukan, baik yang berasal dari dalam negeri, maupun dari luar negeri.
3. hendaklah diberikan pengawasan dan penilaian atas pengaruh pelaksanaan suatu proyek pembangunan terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan politik, terutama dari masyarakat sekitarnya untuk dapat didjadikan pertimbangan terhadap kebidjaksanaan selanjutnja.
4. hendaknja diteliti persiapan administrasi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan rentjana, sehingga dapat diperoleh laporan perkembangan physical dan financial progress report, baik setjara berkala, maupun tahunan yang dapat dipertanggungjawabkan dan pada waktu yang telah ditetapkan.
5. dalam pengawasan dan penilaian hendaklah digunakan norma² yang djelas serta sistem yang tertentu dan sedapat mungkin diusahakan keseragaman dalam norma-norma tersebut.

C. Organisasi dan Administrasi :

1. Organisasi :

Untuk melaksanakan pengawasan dan penilaian harus ada suatu Badan Pengawasan dan Penilaian

*) "Term-Paper" Hasil Karya-kolektip peserta Kursus Perentjanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh BAPPENAS dari tgl. 1-11-1964 sampai tgl. 29-12-1964 di Tjipajung.

1. jang berstatus sedemikian rupa, sehingga mempunyai wewenang untuk meminta dan memperoleh keterangan-keterangan jang diperlukan dari segala pihak.

Badan tersebut djuga mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan pada projek-projek pembangunan tertentu bila dianggapnya perlu. Disamping itu, untuk dapat melaksanakan tugasnja dengan baik dan lantjar, maka Badan ini harus mempunyai bermacam-macam Bagian, sesuai dengan tugas-tugasnja.

Oleh karena rentjana pembangunan itu bersifat menyeluruh, maka disamping Badan Pengawasan dan Penilaian jang tertinggi diperlukan pula adanya badan-badan Pengawasan dan penilaian jang lebih rendah tingkatnja di tempat-tempat jang diperlukan. Bentuk susunan dan tugas dari Badan jang disebut terakhir ini, serta hubungan vertikal antara berbagai macam Badan Pengawasan dan Penilaian itu haruslah ditetapkan dan diatur sedemikian rupa, sehingga tidak akan menghalangi kelantjaran mengenai progress-report (physical dan financial progress report).

2. Administrasi :

Perlu diperhatikan, bahwa kelantjaran pengawasan dan penilaian tergantung pula atas baik administrasinya. Hendaklah diusahakan agar administrasinya tidak terlalu berbelit-belit: terma kemungkinan timbulnja halangan-halangan birokrasi haruslah dihindarkan.

3. Personalia :

Para pengawas dan penilai haruslah terdiri dari tenaga-tenaga jang memiliki kewibawaan, kedjuran, pengetahuan dan pengalaman sedemikian rupa, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnja dengan baik. Hal ini sangat perlu, karena jang ikut sertanja para pengawas dan penilai dalam pelaksanaan rentjana pembangunan jaitu untuk melakukan tugas pengawasan dan penilaian maka Badan pengawasan dan Penilaian djuga bertanggung-djawab atas tertjapainja tujuan pembangunan itu dengan baik.

Pelaksanaan :

dalam melaksanakan pengawasan dan penilaian hendaklah diperhatikan :

tjara :

agar tugas Badan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan teratur, maka terlebih dahulu hendaklah ditetapkan tjara-tjara tertentu jang akan mendjadi pedoman-kerdja dalam melaksanakan setiap aktivitas pengawasan dan penilaian.

norma :

dalam melakukan aktivitanja, maka para pengawas dan penilai hendaklah mempunyai pengetahuan jang tjukup mengenai ketentuan hukum positif dan norma-norma lainnya serta kebiasaan² jang hidup

dalam masyarakat, ditempat mana dilakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan suatu projek pembangunan.

3. objektivita :

pengawasan dan penilaian hendaklah dilakukan se-objektif-objektifnja sehingga tertjapai efisiensi jang sebesar²nja.

Oleh karena demikian, maka diperlukan personalia dari Badan ini, jang harus memenuhi berbagai macam syarat jang diperlukan (kewibawaan, kedjurdjuran, pengetahuan, pengalaman).

4. kelantjaran pekerdjaan :

Badan pengawasan dan Penilaian harus dengan segera dapat memberikan kesimpulan terhadap pengawasan dan penilaian jang dilakukannya dan segera pula menjampaikan pendapatnja beserta saran²nja kepada :

- para pelaksana, dengan maksud agar hasil² pengawasan dan penilaian itu dapat digunakannya dalam usaha memperlantjar pelaksanaan pembangunan.
- jang berwenang dengan maksud agar segera dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan kebidjaksanaan, djika hal itu diperlukan.

5. halangan² jang bersifat external :

dalam menetapkan kesimpulan hasil pengawasan dan penilaian hendaklah diperhatikan pula kesukaran² jang timbulnja djuga sebagai akibat dari faktor² jang berada diluar wewenang pelaksanaan projek pembangunan.

6. tindakan preventif dan repressif.

para pengawas dan penilai haruslah mempunyai pengetahuan dan pengalaman jang tjukup terhadap apa² jang akan diawasi dan dinilainya.

Diperlukan pula pandangan jang tajam terhadap kemungkinan timbulnja penjelewengan, sehingga tindakan² preventif dengan segera dapat dilakukan oleh jang berwenang. Demikian pula haknja, bila penjelewengan-penjelewengan telah terdjadi.

Badan Pengawasan dan Penilaian hendaklah dengan segera pula menjampaikan hasil pengawasan dan penilaiannya, sehingga jang berwenang dengan segera dapat melaksanakan penyelesaian dan melakukan tindakan-tindakan repressif.—

PENGUMUMAN² DEPARTEMEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI/ URUSAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

1. SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA LTD TAKTIS OPERASIONAL DIBAWAH BIPALINDO DALAM MENG-„SURVEY” BARANG-BARANG EKSPOR INDONESIA.

Dengan Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 100/6/MPLN/65 Tahun 1965 ditetapkan bahwa Superintending Company of Indonesia Ltd. taktis operasional dibawah komando langsung BIPALINDO (Biro Pengapalan Indonesia) dalam melaksanakan cargosurveynja. Semua kapal² jang berbendera Indonesia, kapal² hire-purchase dan charter untuk mengangkut barang² ekspor Indonesia harus disurvei mengenai : hatch, stowage, condition, packing, marking dan lain² jang diperlukan, oleh Superintending Company of Indonesia Ltd.

2. PENDAFTARAN KANTOR² PERWAKILAN PERUSAHAAN² ASING DI INDONESIA.

Berhubung banjarknja kantor² Perwakilan dari Perusahaan² Asing jang telah dibuka di Indonesia, maka perlu dilakukan pengawasan dan penertiban atas perwakilan² tersebut berdasarkan ketentuan² peraturan penjaluran perusahaan.

Dengan Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 095/MPDN/SK/65, ditetapkan :

- a. mewajibkan perwakilan² perusahaan² asing di Indonesia baik jang bersifat perorangan maupun badan hukum untuk mendaftarkan pada Direktorat Hubungan Perdagangan Luar Negeri.
- b. terhadap perwakilan² tersebut jang mempunyai tudjuan perdagangan dimaksudkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan tersebut diatas berlaku ketentuan² Undang-Undang Penjaluran Perusahaan „Bedrijfsreglementering Ordonnantie” tahun 1934.
- c. dalam melaksanakan ketentuan² tersebut diatas harus ada kerdjasama antara Kepala Direktorat Hubungan Perdagangan Luar Negeri dan Kepala Direktorat Pengadaan dan Penjaluran. Keputusan ini mulai berlaku tanggal 2 Djuli 1965.

3. SURAT IZIN PENGANGKUTAN ANTAR-PULAU (S.I.P.A.P.) DARI SULAWESI TENGAH KE PULAU DJAWA.

Selama belum ada ketentuan lain maka SIPAP (Surat Izin Pengangkutan Antarpulau) untuk keperluan pengangkutan kopra dari Sulawesi Tengah ke Pulau Djawa hanja dikeluarkan berdasarkan persetujuan khusus dari Direktorat Ekspor Pusat, melalui kawat maupun surat jang harus ditjantumkan dalam SIPAP jang bersangkutan.

4. P.T. PEKSIN DIIKUT SERTAKAN UNTUK MELAKSANAKAN EKSPOR DALAM RANGKA PILOT PROJEK MALUKU.

Untuk memperlantjar pelaksanaan ekspor pala dan bunga pala dari Maluku dalam rangka PILOT PROJEK MALUKU maka disamping P.N. Anek Niaga dan P.N. Satya Niaga, P.T. Peksin perlu diikut sertakan.

Dengan Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri tgl. 8 Djuni 1965 No. 060/MPLN/SK/65 telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Menundjuk P.T. PEKSIN bersama joint partnerja untuk mendirikan suatu perusahaan sortasi guna up-grading pala dan fuli, jang dihasilkan oleh Daerah Maluku sesuai dengan kebijaksanaan jang hingga kini dijalankan dibidang ini.
2. Selama perusahaan sortasi jang dimaksud diatas belum dapat bekerdja sebagaimana biasa, pala fuli diantarpulaukan ke Makasar untuk disortir menjadi barang export-ready. Sesudah disortir barang² tersebut tetap merupakan djatah ekspor Daerah Maluku.
3. Sebagian S.P.P. dan devisa pelengkap sebagai hasil ekspor tersebut, harus dipergunakan untuk mengimpor barang² sesuai dengan permintaan Project Officer jang disandarkan atas kekuasaan menampung dari daerah.

5. IZIN CHUSUS BAGI P.T. DEPARTMENT STORE INDONESIA „SARINAH”.

P.T. Department Store Indonesia „SARINAH” adalah projek vital dari Presiden Republik Indonesia/Mandataris M.P.R.S.

Tudjuan dari P.T. Department Store Indonesia „SARINAH” adalah untuk memajukan industri dalam negeri, mewujudkan stabilisasi harga dan menjadi distributor.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri tgl. 8 Djuni 1965 No. 061/6/MPLN/SK/65 ditetapkan memberi izin khusus kepada P.T. Department Store Indonesia „SARINAH”, untuk mengimpor barang² dalam golongan ekonomi I, II, III dan IV sebagai tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan tertanggal 20 April 1964 No. 105/MPLN/SK/64. Dengan ketentuan bahwa barang² jang diimpor tersebut adalah untuk diperdagangkan pada Department Store Indonesia „SARINAH” dan Tjabaang² jang akan dibentuk.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Djuni 1965.

Bersambung ke halaman 3

Varia berita singkat:

Ekonomi/Perdagangan Internasional

Djepang- KEBIDJAKSANAAN BEA IMPOR AKAN DIROBAH: Sedjak Perang Dunia II, Djepang selalu menundukkan kesabaran terhadap negara² jang mengenakan bea jang tinggi terhadap barang jang berasal dari Djepang. Tapi achir² ini Kementerian Keuangan Djepang merentjanakan mengadakan balasan terhadap negara² jang mengadakan bea jang dianggap tak lajak terhadap barang² dari Djepang.

PAMERAN DAGANG TERAPUNG DJEPANG: Untuk tahun 1965 pameran dagang terapung Djepang akan berlangsung selama kira² 117 hari pelajaran. Akan disinggahi 14 buah pelabuhan² utama di Asia Tenggara dimana akan dipamerkan barang² hasil industri Djepang berupa perlengkapan² industri, mesin² listrik, kendaraan² dan hasil industri tekstil. Akan dpergunakan kapal „Sakura Maru” berukuran 12.000 ton jang akan meninggalkan Tokio pada tgl. 6 November dan ditunggu di Indonesia (Djakarta) sekitar tanggal 21-23 November.

Sailan- KONPERENSI TEH INTERNASIONAL: Dari tanggal 14-28 Djanuari 1966, di Kolombo akan diadakan konperensi teh internasional jang diselenggarakan oleh Colombo Trader Association dengan bantuan Ceylon Tea Propaganda Board. Tudjuannya adalah mengadakan kontrak² pribadi antara pedagang² teh Sailan dengan pembeli² luar negeri; pertukaran keterangan² mengenai perdagangan teh dan mendiskusikan kesulitan² jang dihadapi pihak² bersangkutan dalam bidang usahanya masing².

Jugoslavia- SIMPOSIUM PERDAGANGAN DAN HUKUM: Pada tanggal 16-18 September tahun ini sedjalan dengan Zagreb Internasional Autum Fair (9-19 September), akan diadakan Konperensi Internasional daripada para pedagang dan ahli hukum mengenai persoalan² juridis jang berhubungan dengan perdagangan luar negeri Jugoslavia (The Second International Conference of bussinessmen and lawyers on certain legal questions relating to Jugoslavia foreign trade). Konperensi tersebut dibagi dalam dua bagian: jang pertama bertemakan „kerdja sama perdagangan dan technologie”, dan jang bagian kedua meliputi tiga tema, jaitu

mengenai: „turut sertanja fihak ketiga dalam menentukan mutu barang, perwakilan perdagangan luar negeri dan pembikinan kontrak dalam industri pariwisata”. Para peserta diandjurkan memadjukan saran²/kertas kerdja.

5. **ASIAN CHAMBER OF COMMERCE:** Atas inisiatif Chamber of Commerce Pilipina, dua tahun jang lalu telah diorganiseer Asian Chamber of Commerce jang anggota²nja terdiri dari organisasi² dagang dinegara² Asia. Dalam perjalanannya ke Australia, Ketua International Chamber of Commerce, telah singgah di Manila dan dalam konferensi pers jang diadakan ia telah menjatakan kepuasan dan harapannya bahwa Asian Chamber of Commerce akan banjak manfaatnja dalam memadjukan perdagangan dunia pada umumnya.
6. **Thailand- PAMERAN DAGANG INTERNASIONAL ASIA:** Pada bulan November/Desember 1966, pemerintah Thailand akan menjelenggarakan First Asian International Trade Fair di Bangkok. Diharapkan kira² 40 negara jang akan ikut serta, dan sekarang kira² 12 negara telah menjatakan kesediaan turut serta, antaranja Perantjis, Australia, Iran, India dan Norwegia. Pameran bertudjuan memadjukan perdagangan intra-regional dan hubungan dagang antara Asia dengan negara² lainnya.
7. **PAMERAN PERDAGANGAN DI R.R.T.:** Djepang akan mengadakan pameran perdagangan di Peking dan Shanghai, masing² selama tiga minggu. Disamping itu djuga negara² Rumania, Inggris dan Perantjis akan mengadakan pameran barang² mereka di R.R.T.
8. **KRISIS VIETNAM DAN PERDAGANGAN ASIA:** Dunia perdagangan berpendapat, bahwa ditindjau dari segi ekonomi, perang Vietnam sedikit sekali mempengaruhi pola² perdagangan dan pembangunan di Asia, Negara² didunia lebih menaruh perhatian terhadap potensi² perluasan pasaran di R.R.T.: Sebaliknya barang² R.R.T. membandjiri pasaran² negara² sosialis maupun negara² kapitalis, misalnja „Malaysia” ternjata merupakan pasaran jang penting bagi hasil produksi

R.R.T. Dengan Djepangpun R.R.T. telah mempererat hubungan dagangnja.

9. **LATIHAN DALAM BIDANG MARKETING DAN PROMOTION:** International Trade Center dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), mengumumkan bahwa Italia Institute for Industrial Reconstruction, dari bulan Oktober 1965 — Djuni 1966 menjediakan kesempatan kepada pedjabat² perdagangan dari negara² jang sedang berkembang untuk mengikuti latihan² dalam bidang promotion dan marketing.
10. **Amerika Serikat- „WALL STREET” GONTJANG:** Perkembangan dari Pasar Bursa New York (Wall Street) telah menimbulkan kegusaran kalangan perniagaan maupun pemerintah Amerikat Serikat. Merosotnja harga bursa banjak dihubungkan a.l. dengan pidato Ketua Federal Reserve Board (Mc Chesney Martin). Ia telah mengadakan persamaan² keadaan kondjungtur sekarang dengan ketjemasan² jang terdapat pada waktu² mendjelang depresi tahun 1929. Namun demikian diakui banjak faktor² dan perkembangan² baru jang dapat dianggap sebagai sebab² semakin menurunnja harga dipasar, terutama hal² jang bersifat psikologis/spekulatif.
11. **UNI SOVJET DAN DJEPANG:** Perdagangan kedua negara madju pesat. Ini merupakan manifestasi dari kenjataan bahwa perbedaan sistim sosial tak perlu merupakan rintangan dalam memperkembangkan hubungan² perdagangan jang saling menguntungkan djawa menang sungguh² diinginkan kedua belah pihak. Telah diadakan persetudjuan untuk mengadakan konperens² ekonomi tiap tahun antara kedua negara. Akan diadakan persetudjuan perdagangan djangkapandjang untuk periode 1966-1967.

Sambungan halaman 17.

Aldjazair. Ia ikut mengambil bagian dalam penjujukan program revolusioner FLN di Tripoli.

Bulan September 1962, setelah proklamasi kemerdekaan Aldjazair, Kolonel Boumedienne ditundjuk sebagai Menteri Pertahanan Nasional dan setahun kemudian diangkat sebagai Wakil Ketua I Dewan Menteri.

Sebagai Menteri Pertahanan, Kolonel Boumedienne bertugas menjatukan semua detasemen gerilja kedalam kesatuan tentara resmi guna mempertahankan hasil² jang diperoleh rakjat Aldjazair dalam perjuangannja. Tentara Aldjazair dewasa ini telah diperlengkapi dengan sendjata² modern dan dipimpin oleh perwira² jang terlatih baik. Pihak luar negeri malahan mengakui, bahwa tentara Aldjazair adalah salah satu jang terbaik dibenua Afrika.

(Antara Spektrum).

12. **Siria-BIDANG PERMINJAKAN DIKUASAI NEGARA:** Perusahaan² swasta tak diperkenankan bergerak dalam bidang perminjakan dan direntjanakan oleh negara untuk membangun dan memperkembangkan perminjakan dengan bantuan negara² sosialis terutama Uni Sovjet.
13. **Kuba-PERGIAT BERDIKARI:** Mekanisasi pertanian akan terus dipergiat dan sumber² kekajaan jang terdapat di Kuba akan dipergunakan sepenuhnya. Produksi buah pohon palem akan diperbesar untuk pembuat lemak² untuk makanan. Dua tahun berikut ini djumlah sapi akan diperbesar dengan sedjuta ekor setiap tahunnja dan peternakan kelintji akan diperluas untuk memenuhi kebutuhan akan daging. Produksi gula jang dalam tahun-tahun sebelumnya dapat menghasilkan smpai 8 djuta ton untuk tahun 1965 akan berdjumlah 6 djuta ton sedangkan produksi 1964 hanja berdjumlah 3,8 djuta ton.
14. **Djerman Barat- TAWARKAN BARANG BEKAS PAKAI:** Sorang pedagang Djerman Barat ingin mengeksport barang² bekas-pakai ke Indonesia berupa a.l. sepatu, pakaian, alat rumah tangga dsb. dengan harga jang rendah. Dengan hasil pendjualan tersebut akan dibeli hasil² dari Indonesia. Dibajangkan bahwa ketika Djerman Barat baru mulai pembanguan kembali ekonominja, tjara pengimporan barang² bekas-pakai tersebut telah banjak menolong. Dapat ditambahkan bahwa achir² ini, Junani telah mulai dibardjiri dengan pesawat televisi bekas-pakai dari Djerman Barat.
15. **Tjekoslowakia- IMPOR BARANG² JANG DAPAT DIPRODUSEER DALAM NEGERI:** Dientjanakan mengimpor sepatu dan tekstil mulai tahun ini, meskipun negara ini sendiri merupakan eksportir sepatu dan tekstil jang lumayan. Alasannja ialah bahwa tjara ini akan menimbulkan unsur² kompetisi jang akan memberikan efek jang merangsang terhadap produsen dalam negeri.
16. **EKSPOR MOBIL DARI PERANTJIS K R.R.T.:** Berliet Truck Company akan mengimpor ekspor sedjumlah seribu buah truck-berat ke Republik Rakjat Tiongkok seharga U.S.\$ 3 djuta.
17. **Australia— RAME² GULUNG TIKAR:** Karena daja beli rakjat terus merosot, banjak perusahaan terpaksa gulung tikar. Malahan salah sebuah perusahaan jang telah landjut usianja, terpaksa diistirahatkan.

Varia berita singkat:

Ekonomi/Perdagangan Dalam Negeri

1. PENANGGUHAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN R.I. / PANGLIMA BESAR KOTOE No. 43/KOTOE TAHUN 1965 DAN No. 44/KOTOE TAHUN 1965.

Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 43/KOTOE Tahun 1965 dan No. 44/KOTOE Tahun 1965 telah ditetapkan Pola-Pola 'ataniaga Kopra dan Ketentuan-Ketentuan Mengenai Prosedur Tataniaga Kopra.

Dengan Telegram/kawat No. 420/KOTOE-Sekrt/1965 tanggal 19 Djuli 1965 sebagai ralat atas Telegramnja No. 414a/KOTOE-Sekrt/65 tanggal 13 Djuli 1965 yang ditunjukkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I diseluruh Indonesia, oleh J.M. Menteri/Sekretaris Umum Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, ditegaskan bahwa sambil menunggu penyelesaian reorganisasi dan fungsionalisasi Badan Urusan Kopra (BUKOPRA) KOTOE, pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas ditangguhkan sampai peraturan pelaksanaannya telah selesai.

2. TARGET EKSPOR BAUKSIT TAHUN 1965, 1966, 1967.

Pemasaran bauksit Indonesia masih mengalami kesukaran-kesukaran disebabkan karena persaingan yang kuat di pasaran internasional serta belum terdapatnja industri peleburan (smelting industry) didalam negeri dengan akibat masih terbatasnja konsumsi didalam negeri.

Bauksit tersebut dapat diekspor dengan menghasilkan devisa yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan. B.P.U.-Perusahaan² Tambang Umum Negara mendapat kewajiban untuk meniadakan devisa guna membiayai projek-projek pertambangan lainnja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalam Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia No. Aa/D/90/1965 tertanggal 28 Djuni 1965 ditetapkan Target Ekspor Bauksit sebesar 900.000 metricton untuk tahun 1965, 1966 dan 1967 dengan perintjian 633.000 metricton setiap tahunnja.

Ditetapkan selandjutnja mengenai penugasan pada B.P.U.-Perusahaan-Perusahaan Tambang Umum Negara untuk mengusahakan tertjapainja target ekspor tersebut diatas dengan ketentuan bahwa bila telah tertjapai 10% dibawah target tersebut, hasil lebihnja dapat dipergunakan untuk

membiayai pembangunan projek-projek pertambangan lainnja.

3. PENUGASAN IMPOR BAHAN-BAHAN BAKU UNTUK PRODUKSI SANDANG.

Dengan Surat Keputusan Menteri/Sekretaris Umum Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi tanggal 30 Djuni 1965 No. 42/SESU-KOTOE/1965 telah ditetapkan P.N. Pantja Niaga mendjadi importir dan penjalur-tunggal daripada bahan-bahan kimia tekstil, dyestuff dan kapas, yang berasal dari impor dengan alokasi devisa negara.

P.N. Pembangunan Niaga mendjadi importir dan penjalur-tunggal daripada spareparts/Accesoris mesin-mesin tekstil, yang berasal dari impor dengan alokasi devisa negara.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak impor atas beban R.I.B. 1965.

4. MANFAATKAN FUNGSI PROJEK DJATILUHUR.

Presiden Sukarno telah menekankan amanatnja supaya hendaknja projek serbaguna Djatiluhur yang dewasa ini tengah giat diselesaikan pembangunannya, nantinja benar-benar dapat dimanfaatkan fungsinya. Untuk meninggikan produksi pertanian, rakjat membutuhkan air. Demikian pula dibidang kelistrikan, bukan s saja dibidang penerangan rakjat membutuhkannya, tetapi djuga untuk industri, listrik digunakan untuk melantjarkan kegiatan produksi.

Menurut Menteri Pengairan Dasar Ir Harjansudardja, perkembangan pembangunan projek serbaguna Djatiluhur itu diharapkan dapat diselesaikan pada awal tahun depan, dimana Presiden sendiri akan meresmikannya. Khususnja mengenai manfaat yang diperoleh dari projek itu disektor pertanian dijelaskan bahwa dalam musim kemarau tahun 1966, dari air yang ditampung oleh bendungan-bendungan Djatiluhur, sudah dikirakan akan dapat menambah produksi beras panen minimum sebanyak 250.000 ton.

5. UNDANG-UNDANG POKOK PERKOPERASIAN DISETUDJUI D.P.R.G.R.

D.P.R.G.R. dalam rapat paripurnanja hari Sabtu tanggal 3 Djuli 1965 telah menjetudjui R.U.U. tentang Pokok Perkoperasian mendjadi Undang-Undang.

Memori pendjelasan atas UU Perkoperasian tersebut antara lain menjatakan, bahwa berlakunya kembali U.U.D. 1945 dan dengan ditetapkannya Manipol dan Amanat Pembangunan Presiden oleh M.P.R.S. serta ditetapkannya Deklarasi Ekonomi (Dekon) sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia, menuntut setjara mutlak perubahan fungsi dari segala lembaga kemasjarakatan, chususnja gerakan koperasi untuk disesuaikan dengan Haluan Negara maupun Haluan Pembangunan serta strategi dasar tersebut.

Sesuai dg. prinsip tersebut diatas serta pertumbuhan koperasi sendiri dalam kehidupan ekonomi Indonesia, perlu dikeluarkan Undang-Undang baru dalam perkoperasian guna menjempurnakan U.U. No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi.

Undang-Undang jang baru ini dinamakan Undang-Undang tentang Perkoperasian jang mengatur segala sesuatu jang menjangkut kehidupan koperasi dibidang landasan idiil/haluan, organisasi dan usaha.

Agar tidak terdapat kekakuan dalam mengikuti gerak dan dinamikanja revolusi Indonesia, Undang-Undang ini hanja mengatur soal-soal pokok perkoperasian jang intisarinja sebagai berikut :

- a. Dibidang landasan idiil/haluan perkoperasian dipergunakan pangkal tolak pemikiran bahwa pola koperasi adalah suatu bagian jang tidak terpisahkan dari Doktrin Revolusi/Dasar Falsafah Negara Pantjasila.
- b. Dibidang organisasi ditetapkan ketentuan, ketentuan pokok tentang keanggotaan, alat-alat perlengkapan organisasi, djenis-djenis koperasi, penentuan Munaskop sebagai tertinggi dari gerakan koperasi jang dinamakan Gerakan Koperasi Indonesia sebagai pemersatu dan pengawasan dari segala djenis koperasi serta sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan Munaskop.

Sambungan halaman 10

5. melaporkan kepada masing-masing instansi-pusatnja mengenai keputusan-keputusan jang telah diambil chusus jang menjangkut bidangnya;
6. dalam melaksanakan tugasnja, Team Daerah menerima petundjuk-petundjuk/instruksi-instruksi dari dan bertanggungjawab kepada Team Crash Program Ekspor Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.

Keempat :

L A I N-L A I N :

1. Keputusan-keputusan Team Ekspor Pusat dan Team Ekspor Daerah bersifat mengikat sesuai dengan garis kebidaksanaan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.

- c. Dibidang usaha dimuat pula ketentuan pokok tentang dasar aktivitas ekonomi koperasi agar koperasi tidak tenggelam dalam soal-soal materi jang dapat mengakibatkan koperasi bersarang dalam alam kapitalisme, akan tetapi diarahkan agar dalam tahap nasional demokratis sekarang ini dapat mengkomunikasikan setjara tepat antara kegiatan-kegiatan jang bersifat tambal sulam (reform act) dan kegiatan bersifat revolusioner (doels act tie).

6. KEKUATAN ARMADA NIAGA INDONESIA

Kekuatan armada niaga Indonesia pada waktu ini dapat diperintji sebagai berikut :

I. Pelajaran Samudra :

1. P.N. Djakarta Llyod beroperasi dengan 9 kapal, diantaranya 9 kapal milik dan 0 kapal hire-purchase (sewa-beli). Tonase seluruhnja ada \pm 324.000 dwt. Untuk Around the World Service dipakai
 - a. Latuharhary (milik)
 - b. Thamrin (milik)
 - c. Mekong (hire-purchase)
 - d. Donai (")
 - e. Meinam (")

Kapal-kapal lainnja berljajar ke Eropa Laut Tengah, Djepang, R.R.T. dan Australia.

2. Maskapai-maskapai Swasta/chusus : ada empat maskapai, jaitu Trikora, Samudra Indonesia, Gesuri Llyod dan Affan Ray (kini dischors). Maskapai-maskapai ini memiliki 6 kapal dengan tonase total \pm 28.000 dwt. Target tonase pelajaran samudra 8 tahun untuk achir 1968 adalah 250.000 dwt.

II. Pelajaran Pantai :

1. P.N. Pelni mempunyai 86 kapal dengan tonase \pm 150.000 dwt.
2. Ada 38 perusahaan swasta jang mempunyai kapal, djumlahnja 240 kapal dengan tonase total \pm 152.000 dwt.

2. Hal-hal jang belum ditetapkan dalam Surat Keputusan ini ditentukan lebih landjut oleh Menteri/Sekretaris Umum Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 14 Djuni 1965.

a.n. PRESIDEN/PANGLIMA BESAR
KOMANDO TERTINGGI
OPERASI EKONOMI
WAKIL PANGLIMA BESAR I

t.t.d.

(Dr. SOEBANDRIO).

P. T. K A R K A M

(P.T. KULIT ATJEH RAYA KAPTEN MARKAM)

KANTOR PUSAT : Djl. Pintubesar Selatan 97 atas Djakarta-Kota
Tilpon 23368 - 22644 - 21092
alamat kawat : KARKAM DJAKARTA

KANTOR TJABANG : M E D A N
Pekanbaru
Dumai
Rengat
Djambi

KANTOR PERWAKILAN : Tembilahan
Bengkalis
Palembang
Sibolga

PPN P.T. KARKAM : Aermolek (Riau)
Perusahaan Remilling P.T. KARKAM : Kampung Lalang Sunggal
(Sumatra Utara)

EXPORTIR : K A R E T
K O P R A
dan hasil perkebunan lainnja

IMPORTIR : BARANG² KEPERLUAN PEMBANGUNAN
KENDARAAN²
MESIN² DIESEL
untuk berbagai matjam keperluan
MESIN² KAPAL
* * *

BANK² KAMI IALAH : BANK INDONESIA
BANK NEGARA INDONESIA
BANK DAGANG NEGARA
BANK KOPERASI TANI & NELAJAN
* * *

** Dalam rangka „banting setir” untuk „berdikari” dibidang ekonomi dan pembangunan,
P.T. KARKAM melaksanakan kegiatan²-nja semata-mata untuk membantu Pemerintah.

** Sembojan kami ”MADJU TERUS PANTANG MUNDUR” UNTUK KEMENANGAN
REVOLUSI dan UNTUK TERTJAPAINJA MASJARAKAT SOSIALIS INDONESIA.

PEMBIAJAAN/PEMBANGUNAN INDUSTRI PESAWAT TERBANG "BERDIKARI"

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 182 tahun 1965 tertanggal 21 Djuni 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan Industri Pesawat Terbang „BERDIKARI” diperlukan suatu tjara² pembiayaan jang tjepat dan effisien dengan pembiayaan rupiah jang seminimal mungkin didalam rangka pembiayaan dengan tjara „Cash down Compensation”;
2. Bahwa tjara pembiayaan „Cash down Compensation” tersebut dapat mendjamin pembiayaan devisa jang minimal dan berarti menekan harga dibandingkan dengan tjara² pembiayaan kredit seperti lazim berlaku;

Mengingat :

1. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. VI/MPRS/1965 tertanggal 16 April 1965 tentang Banting Stir untuk Berdikari Diatas Kaki Sendiri dibidang Ekonomi dan Pembangunan;
2. Dwikomando Rakjat;
3. Deklarasi Ekonomi;
4. Instruksi P.J.M. Presiden Kepada J.M. Menteri Panglima Angkatan Udara untuk segera mengambil langkah² bagi terlaksananya Industri Penerbangan dan Angkasa Luar;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 tahun 1965 tentang Organisasi dan tugas Komando Pelaksana Industri Pesawat Terbang;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1965 tentang P.N. Industri Pesawat Terbang „BERDIKARI”;
7. Surat Perintah Presiden Republik Indonesia No. 04 tahun 1965 tanggal 11 Mei 1965;

Memperhatikan :

1. Saran² serta laporan Presidium Kabinet Dwikora, Menteri Panglima Angkatan Udara, Menteri Bank Sentral, Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan Udara serta para Pemrakarsa projek Industri Pesawat Terbang tersebut P.T. IMER-MOTORS dan Induk Koperasi PUKADARA;
2. Surat² dan dokumen² N.V. Koninkelijke Vliegtuig industrie Fokkers dan Die Westhaghe N.V. Amsterdam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Menginstruksikan tjara pembayaran „Cash down Compensation” didalam rangka pelaksanaan Projek Presiden/Mandataris MPRS mengenai Pembangunan

Industri Pesawat Terbang menurut pokok² ketentuan tersebut dibawah ini :

1. Bahan², komponen² serta alat² peralatan untuk keperluan Industri Pesawat Terbang „BERDIKARI” dari luar negeri dibajarkan oleh Bank Indonesia Tjabang Amsterdam dari Dana Devisa KOPELAPIP dengan tjara tunai kepada supplier.
2. Dana Devisa KOPELAPIP tersebut diperoleh dari pendjualan seluruh bahan² ekspor jang di ekspor oleh operators ekspor jang telah ditunjuk untuk keperluan pembayaran Projek Industri Pesawat Terbang „BERDIKARI” tersebut jang pendjualannya dilakukan oleh suatu handling agency diluar negeri jang telah ditunjuk.
3. Untuk memperoleh harga jang se-tinggi²nja pendjualan tersebut di ad (2) harus disetujui oleh Perwakilan KOPELAPIP di Amsterdam dan Bank Indonesia Tjabang Amsterdam. Harga penjerahan kepada pemerintah i.c. KOPELAPIP adalah sebesar harga pendjualan tersebut diatas.
4. Barang² ekspor tersebut di ad (2) dikirimkan dari Indonesia dengan tjara consignment. Eksportir di Indonesia seperti tersebut di ad (2) tidak memperoleh nilai lawan rupiah dari harga penjerahan tersebut di ad (3), melainkan memperoleh pembayaran penggantian dari Dana Rupiah KOPELAPIP sesuai dengan chekprice domestic jang telah ditetapkan oleh KOPELAPIP. Chekprice domestic tersebut diatas jang ditetapkan dengan basis fob didjamin akan memberikan keuntungan jang lajak kepada Eksportir jang bersangkutan.
5. Dana Rupiah KOPELAPIP tersebut diperoleh dari pendjualan barang² konsumsi jang diimporth dengan Dana Devisa KOPELAPIP untuk kepentingan pembiayaan Rupiah Projek Industri Pesawat Terbang „BERDIKARI”. Djumlah prosentase barang² konsumsi ditetapkan oleh Panglima KOPELAPIP berdasarkan kebutuhan rupiah jang harus mentjukupi segala pembiayaan dan pemodalan domestic untuk melaksanakan hingga selesai Projek Industri Pesawat Terbang „BERDIKARI”.
6. Bank Indonesia diwadjabkan :
 - a. memberikan uang muka kepada KOPELAPIP hingga se-besar²nja 60 (enam puluh) milyar rupiah untuk kepentingan pembiayaan ekspor dan sebesar²nja 40 (empat puluh) milyar untuk pemodalan P.N. Industri Pesawat Terbang BERDIKARI”.

Bersambung ke halaman 3

- b. menjijiskan Nfl 80.000.000 (delapan puluh djuta Nederland gulden) dari turnover hasil devisa perdagangan ke Nederland sebagai djaminan pembajaran kepada N.V. Koninkelijke Vliegtuig Industrie Fokkers dan Die Westhaghe N.V. dalam rangka pembelian pabrik pesawat terbang lengkap dengan komponen² dan segala alat peralatannya, sebagai tjadangan andaikata pemupukan Dana Devisa dari kegiatan² ekspor KOPELAPIP tidak mentjapai targetnja.

DUA :

Untuk melaksanakan pola pembiajaan diangka PERTAMA tersebut diatas dapat digunakan segala portable goods Indonesia jang menurut pertimbangan Panglima KOPELAPIP dan Menteri Perdagangan dianggap efisien dan menguntungkan.

TIGA :

Menundjuk sebagai market operators didalam pelaksanaan Industri Pesawat Terbang untuk kepentingan P.N. Industri Pesawat Terbang „BERDIKARI”, perusahaan² sebagai berikut :

- a. Sebagai eksportir di Indonesia P.T. IMERMOTORS dan Induk Koperasi PUKADARA, masing² berkedudukan di Djakarta.
- b. Sebagai Importir di Indonesia P.T. IMERMOTORS tersebut diatas.
- c. Sebagai market handling-agency dipasaran International baik untuk memasarkan ekspor commodities maupun untuk mengumpulkan dan mengkoordinasikan supply bahan² dan komponen² diluar negeri untuk keperluan Industri Pesawat Terbang „BERDIKARI” tersebut, perusahaan perdjuaan dari IMERMOTORS dan PUKADARA diluar negeri jang bernama N.V. AREV (Api Revolusi) Handelsmaatschappij Amsterdam.

Menetapkan komisi untuk eksportir sebesar 2% dalam valuta asing berdasarkan nilai fob dan handling-commission sebesar 5% dari nilai fob untuk handling agency diluar negeri.

EMPAT :

Hal² jang belum ditetankan dalam Keputusan Presiden ini diatur oleh Presiden/Panglima Tertinggi Atau Panglima Komando Pelaksana Projek Industri Pesawat Terbang.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaja setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan memuatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Djuni 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SUKARNO

HASIL² BUMI DATI II KEPULAUAN RIAU JANG DIBERIKAN S.P.P. TAMBAHAN 10%

Dengan Surat Keputusan Direktorat Ekspor No. 2969/KD/DEK/65, tertanggal 16 Djuli 1965 telah ditetapkan hasil-hasil bumi/laut barang-barang jang dihasilkan DATI II Kepulauan Riau, baik jang diusahakan oleh rakjat maupun perkebunan, jang untuk ekspornja diberikan Surat Pendorong Produksi (S.P.P.) Tambahan, sebagaimana termaksud dalam surat Keputusan Bersama Kuasa Menteri Perdagangan dan Menteri Urusan Bank Sentral No. Kep. 60/UBS/65 tertanggal 16 Djuli 1965, adalah sebagai tersebut dibawah ini :

1. karet dan getah lainnja
2. kopra
3. sagu rumbia
4. gambir
5. pinang
6. kulit kerang
7. ikan dan hasil-hasilnja
8. rumput laut dan hasil laut lainja
9. arang/kaju bakar dan hasil panglong lainnja
10. buah nanas (segar maupun jang diawetkan dalam kaleng)
11. dan lain-lain.

Sehubungan dengan Surat Keputusan Bersama tersebut diatas, maka dengan Keputusan Panglima Kesatuan Operasi I Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 021/Ko-I/1965 tanggal 19 Djuli 1965 telah ditetapkan antara lain :

1. Melarang Pengangkutan antar-pulau hasil-hasil bumi dari daerah-daerah lain ke Dati II Kepulauan Riau ketjuali dari Daerah-Daerah lain jang diberikan S.P.P. Tambahan 10%.
2. Larangan tersebut diatas tidak berlaku terhadap hasil-hasil bumi jang diperlukan untuk keperluan konsumsi Dati II Kepulauan Riau.
3. Terhadap pengangkutan antar-pulau dalam sub. 1 dan sub. 2 diatas tetap perlu dilindungi dengan Surat Izin Pengangkutan Antar Pulau (SIPAP) sesuai dengan peraturan jang berlaku.

(Sambungan halaman 30).

6. JANG MUTIA MENTERI PERDAGANGAN TANGGAL 19 DJULI 1965 MULAI BERKANTOR DI GEDUNG DEPARTMEN PERDAGANGAN.

Pada hari Senin, tanggal 19 Djuli 1965 J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri Brigdjen A. JUSUF mulai berkantor di Gedung Departemen Perdagangan di Jalan Tanah Abang Timur 87, Djakarta.

Seperti diketahui sampai dengan tanggal 17 Djuli 1965 J.M. Menteri berkantor di Gedung KESOP IV/KOTOE (KOPEDASAN) selama Gedung Departemen Perdagangan sedang diperbaiki interieurnja.

PENETAPAN HARGA PENJERAHAN BARANG' EKSPOR GOLONGAN II
PENGUMUMAN BLLD/NO. 41/HP/65.
BERLAKU DARI TGL. 19 DJULI s/d 31 DJULI 1965.

1. COPAL MALENGKET Per Kwintal.

kwaliteit P.W.S.	Nf.	81,—
kwaliteit M.A.P.	Nf.	69,—
kwaliteit W.S.	Nf.	72,—
kwaliteit W.S. (Batjan)	Nf.	59,—
kwaliteit L.A.S	Nf.	34,—
kwaliteit M.A.	Nf.	23,—
kwaliteit M.B.	Nf.	9,—

2. COPAL LOBA Per Kwintal.

kwaliteit A	Nf.	79,—
kwaliteit B	Nf.	71,—
kwaliteit C.1	Nf.	68,—
kwaliteit C.1	Nf.	59,—
kwaliteit D	Nf.	55,—
kwaliteit D.B.B.	Nf.	51,—
kwaliteit E	Nf.	48,—
kwaliteit I	Nf.	43,—
kwaliteit Dust	Nf.	12,—

3. KULIT KERBAU Intermediate Per Kwintal.

berat 8 — 10 kg	DM.	200,—
berat 10 — 13 kg	DM.	204,—
berat 13 — 16 kg	DM.	210,—
berat 16 — 20 kg	DM.	218,—
berat 20 — up	DM.	222,—

4. KULIT KERBAU Second Per Kwintal.

berat 8 — 19 kg	DM.	140,—
berat 10 — 13 kg	DM.	142,—
berat 13 — 16 kg	DM.	147,—
berat 16 — 20 kg	DM.	152,—
berat 20 — up	DM.	155,—

5. KULIT KERBAU Pickers Per Kwintal.

berat 8 — 10 kg	DM.	113,—
berat 10 — 13 kg	DM.	117,—
berat 13 — 16 kg	DM.	123,—
berat 16 — 20 kg	DM.	131,—
berat 20 — up	DM.	139,—

6. KULIT KAMBING Ukuran 70 — 100 cm. First Per Lembar.

berat average 34 kg (per 100 lembar)	Fr. pence	54
berat average 37 kg (per 100 lembar)	Fr. pence	57
berat average 40 kg (per 100 lembar)	Fr. pence	60
berat average 50 kg (per 100 lembar)	Fr. pence	70
berat average 60 kg (per 100 lembar)	Fr. pence	80
berat average 65 kg (per 100 lembar)	Fr. pence	85
berat average 70 kg (per 100 lembar)	Br. pence	90

7. KULIT KAMBING Ukuran 70 — 100 cm. Second Per Lembar.

berat average 34 kg (per 100 lembar)	Br. pence	40½
berat average 37 kg (per 100 lembar)	Br. pence	42¾
berat average 40 kg (per 100 lembar)	Br. pence	45
berat average 50 kg (per 100 lembar)	Br. pence	52½
berat average 60 kg (per 100 lembar)	Br. pence	60
berat average 65 kg (per 100 lembar)	Br. pence	63¾
berat average 70 kg (per 100 lembar)	Br. pence	67½

8. KULIT GIBAS Ukuran 70 — 100 cm. First Per Lembar.

berat average 50 kg (per 100 lembar)	Br. pence	50
berat average 60 kg (per 100 lembar)	Br. pence	60
berat average 70 kg (per 100 lembar)	Br. pence	70

9. KULIT GIBAS Ukuran 70 — 100 cm. Second Per Lembar.

berat average 50 kg (per 100 lembar)	Br. pence	57
berat average 60 kg (per 100 lembar)	Br. pence	65
berat average 70 kg (per 100 lembar)	Br. pence	72

10. KOPI ROBUSTA Per Kg.

EK. I	DM.	1.16
EK. II	DM.	1.10
EK. III	DM.	1.06
20/25%	DM.	1.03
AP. I	DM.	1.19
AP. II	DM.	1.05
G.B. 10/12%	DM.	1.06
JAVA W.I.B./I	DM.	1.69

11. KOPI ARABICA Per Kg.

Sumatera/Sibolga D.P.	DM.	2.73
Java W.I.B./I	DM.	3.52
Java W.I.B./SUP	DM.	3.70
Sulawesi Rantepao D.P.	DM.	3.38
Sulawesi Kalosi D.P.	DM.	3.78
Sulawesi Rantepao Triage	DM.	2.02
Sulawesi Kalosi Triage	DM.	2.27

12. COCOABEANS Per Kg.

kwalitas A	DM.	2.80
kwalitas B	DM.	2.65

13. PALA KUPAS Per Kwintal.

Siauw ABCD	DM.	440,—
Siauw Rimpel	DM.	410,—
Siauw BWP	DM.	331,—
Papua ABC	DM.	338,—
Papua BWP	DM.	277,—

14. PALA KUPAS MENADO — TAGULANDANG SANGIR — AMBON Dan TERNATE (Bukan BANDUK Bukan SIAUW) Per Kwintal.

ABCD	DM.	418,—
Rimpel	DM.	390,—
BWP.	DM.	315,—

15. PALA PADANG BIDJO SARING

Per Kwintal	US\$.	90,—
-------------------	-------	------

16. PALA PADANG Per Kwintal US\$ 47,—

17. BUNGA PALA Per Kwintal.

Siauw I	DM.	550,—
Siauw Gruis I	DM.	528,—
Siauw II	DM.	508,—
Siauw Gruis II	DM.	486,—
Papua I	DM.	395,—
Papua Gruis I	DM.	378,—
Papua II	DM.	360,—
Papua Gruis II	DM.	346,—

18. VANILI Per Kg.

kwaliteit ABC	US\$.	5.21
kwaliteit cuttings	US\$.	4.49
kwaliteit loose-cuts	US\$.	4.49

19. COPRA CAKES/CHIPS Per Kwintal (Kadar Min Max. 15%).

copra cakes	DM.	13,—
copra chips	DM.	14,—
ground telquel chips/cakes	DM.	13,—

Bersambung ke hlm.

**PENETAPAN HARGA PENJERAHAN BARANG² EKSPOR GOLONGAN II
PENGUMUMAN BLLD/NO. 41A/HP/65.**

BERLAKU DARI TGL. 19 DJULI s/d 14 AGUSTUS 1965

		Tudjuan :				Tudjuan :	
		Eropa	Hongkong	Eropa	Hongkong		
1.	Rotan pulut merah W & S per kwintal						
	kwaliteit I ukuran 3/5	DM. 75,—	HK\$. 134,—				
	kwaliteit II ukuran 3/5	DM. 50,—	HK\$. 104,—				
	kwaliteit III ukuran 3/5	DM. 23,—	HK\$. 40,—				
2.	Rotan pulut merah unwashed per kwintal						
	kwaliteit I ukuran 3/5	—	HK\$. 131,—				
	kwaliteit II ukuran 3/5	—	HK\$. 102,—				
	kwaliteit III ukuran 3/5	—	HK\$. 39,—				
3.	Rotan pulut putih W & S per kwintal						
	kwaliteit I ukuran 3/5	DM. 50,—	HK\$. 89,—				
	kwaliteit II ukuran 3/5	DM. 18,—	HK\$. 37,—				
	kwaliteit III ukuran 3/5	DM. 15,—	HK\$. 26,—				
4.	Rotan pulut putih unwashed per kwintal						
	kwaliteit I ukuran 3/5	—	HK\$. 86,—				
	kwaliteit II ukuran 3/5	—	HK\$. 34,—				
	kwaliteit III ukuran 3/5	—	HK\$. 25,—				
5.	Rotan Sega W & S per kwintal						
	kwaliteit I ukuran 4/11	DM. 80,—	HK\$. 149,—				
	kwaliteit II ukuran 4/11	DM. 60,—	HK\$. 104,—				
	kwaliteit III ukuran 4/11	DM. 35,—	HK\$. 67,—				
6.	Rotan Sega unwashed per kwintal						
	kwaliteit I ukuran 4/11	—	HK\$. 146,—				
	kwaliteit II ukuran 4/11	—	HK\$. 102,—				
	kwaliteit III ukuran 4/11	—	HK\$. 64,—				
7.	Rotan Djahab W & S per kwintal						
	kwaliteit I ukuran 8/11	DM. 60,—	HK\$. 209,—				
	kwaliteit II ukuran 8/11	DM. 48,—	HK\$. 82,—				
	kwaliteit halfhard ukuran 8/11	DM. 38,—	HK\$. 67,—				
	kwaliteit III ukuran 8/11	DM. 30,—	HK\$. 60,—				
	kwaliteit IV ukuran 8/11	DM. 20,—	HK\$. 44,—				
	kwaliteit V ukuran 4/8	DM. 27,—	HK\$. 54,—				
8.	Rotan Djahab unwashed per kwintal						
	kwaliteit I ukuran 8/11	—	HK\$. 102,—				
	kwaliteit II ukuran 8/11	—	HK\$. 79,—				
	kwaliteit halfhard ukuran 8/11	—	HK\$. 64,—				
	kwaliteit III ukuran 8/11	—	HK\$. 57,—				
	kwaliteit IV ukuran 4/8	—	HK\$. 55,—				
	kwaliteit IV ukuran 8/11	—	HK\$. 41,—				
9.	Rotan kooboo/kooboo soft W & S per kwintal						
	kwaliteit II ukuran 8/11	DM. 25,—	HK\$. 47,—				
	kwaliteit III ukuran 8/11	DM. 15,—	HK\$. 30,—				
	kwaliteit III ukuran 4/8	DM. 23,—	HK\$. 41,—				
10.	Rotan kooboo/kooboo soft unwashed per kwintal						
	kwaliteit II ukuran 8/11	—	HK\$. 44,—				
	kwaliteit III ukuran 8/11	—	HK\$. 28,—				
	kwaliteit III ukuran 4/8	—	HK\$. 39,—				
11.	Rotan kooboo/kooboo soft W & S per kwintal						
	kwaliteit halfhard ukuran 4/8	DM. 35,—	HK\$. 72,—				
12.	Rotan kooboo/kooboo soft unwashed per kwintal						
	kwaliteit halfhard ukuran 4/8	—	HK\$. 51,—				
13.	Rotan Tolakan (ex Kalimantan)	—	HK\$. 22,—				
14.	Rotan tohiti W & S per kwintal						
	kwaliteit I ukuran 18/24 ...	DM. 60,—	HK\$. 104,—				
	kwaliteit II ukuran 18/24 ...	DM. 55,—	HK\$. 97,—				
	kwaliteit IIB ukuran 18/24 ...	DM. 50,—	HK\$. 89,—				
	kwaliteit III ukuran 18/24 ...	DM. 44,—	HK\$. 81,—				
	kwaliteit IIIB ukuran 18/24 ...	DM. 32,—	HK\$. 62,—				
	kwaliteit IV ukuran 18/24 ...	DM. 20,—	HK\$. 44,—				
	kwaliteit IV/B ukuran 18/24 ...	DM. 18,—	HK\$. 34,—				
	kwaliteit V ukuran 18/24 ...	DM. 14,—	HK\$. 26,—				
	kwaliteit V ukuran 10/18 ...	DM. 11,—	HK\$. 20,—				
15.	Rotan tohiti unwashed per kwintal						
	kwaliteit I ukuran 18/24 ...	—	HK\$. 102,—				
	kwaliteit II ukuran 18/24 ...	—	HK\$. 93,—				
	kwaliteit IIB ukuran 18/24 ...	—	HK\$. 86,—				
	kwaliteit III ukuran 18/24 ...	—	HK\$. 78,—				
	kwaliteit IIIB ukuran 18/24 ...	—	HK\$. 60,—				
	kwaliteit IV ukuran 18/24 ...	—	HK\$. 41,—				
	kwaliteit IV/B ukuran 18/24 ...	—	HK\$. 30,—				
	kwaliteit V ukuran 18/24 ...	—	HK\$. 23,—				
16.	Rotan anduru W & S per kwintal						
	kwaliteit I ukuran 4/8	DM. 26,—	HK\$. 54,—				
	kwaliteit II ukuran 4/8	DM. 20,—	HK\$. 41,—				
	kwaliteit III ukuran 4/8	DM. 14,—	HK\$. 28,—				
17.	Rotan anduru unwashed per kwintal						
	kwaliteit I ukuran 4/8	—	HK\$. 50,—				
	kwaliteit II ukuran 4/8	—	HK\$. 39,—				
	kwaliteit III ukuran 4/8	—	HK\$. 25,—				
18.	Rotan lita W & S per kwintal						
	kwaliteit I ukuran 8/11	DM. 10,—	HK\$. 23,—				
	kwaliteit II ukuran 8/11	DM. 8,—	HK\$. 18,—				
19.	Rotan lita unwashed per kwintal						
	kwaliteit I ukuran 8/11	—	HK\$. 25,—				
	kwaliteit II ukuran 8/11	—	HK\$. 15,—				
20.	Rotan datuk merah W & S per kwintal						
	kwaliteit I ukuran 4/8	DM. 50,—	HK\$. 89,—				
	kwaliteit II ukuran 4/8	DM. 38,—	HK\$. 65,—				
	kwaliteit III ukuran 4/8	DM. 28,—	HK\$. 50,—				
	kwaliteit IV ukuran 4/8	DM. 10,—	HK\$. 20,—				
21.	Rotan datuk merah unwashed per kwintal						
	kwaliteit I ukuran 4/8	—	HK\$. 86,—				
	kwaliteit II ukuran 4/8	—	HK\$. 64,—				
	kwaliteit III ukuran 4/8	—	HK\$. 47,—				
	kwaliteit IV ukuran 4/8	—	HK\$. 18,—				
22.	Rotan datuk putih W & S per kwintal						
	kwaliteit I ukuran 4/8	DM. 30,—	HK\$. 60,—				
	kwaliteit II ukuran 4/8	DM. 23,—	HK\$. 44,—				
	kwaliteit III ukuran 4/8	DM. 12,—	HK\$. 26,—				
23.	Rotan datuk putih unwashed per kwintal						
	kwaliteit I ukuran 4/8	—	HK\$. 57,—				
	kwaliteit II ukuran 4/8	—	HK\$. 41,—				
	kwaliteit III ukuran 4/8	—	HK\$. 23,—				
24.	Rotan kendari buton unwashed per kwintal						
	kwaliteit I ukuran 3/7	—	HK\$. 109,—				
	kwaliteit II ukuran 3/7	—	HK\$. 86,—				
	kwaliteit III ukuran 3/7	—	HK\$. 60,—				
	kwaliteit IV ukuran 3/7	—	HK\$. 29,—				
25.	Rotan kendari buton W & S per kwintal						
	kwaliteit I ukuran 3/7	DM. 65,—	HK\$. 112,—				

Tudjuan :
Eropa Hongkong

	kwaliteit II ukuran 3/7	DM. 50,—	HK\$. 89,—
	kwaliteit III ukuran 3/7	DM. 32,—	HK\$. 62,—
	kwaliteit IV ukuran 3/7	DM. 12,—	HK\$. 33,—
26.	Rotan manuk W & S per kwintal		
	kwaliteit I ukuran 10/12 ...	DM. 5,—	HK\$. 13,—
27	Rotan manuk unwashed per kwintal	—	HK\$. 10,—
28.	Rotan sabutan W & S per kwintal		
	kwaliteit III ukuran 8/12 ...	DM. 20,—	HK\$. 44,—
	kwaliteit IIIB ukuran 8/12 ...	DM. 19,—	HK\$. 43,—
	kwaliteit IV ukuran 8/12 ...	DM. 17,—	HK\$. 39,—
	kwaliteit IV/B ukuran 8/12 ...	DM. 12,—	HK\$. 30,—
	kwaliteit V ukuran 8/12 ...	DM. 10,—	HK\$. 26,—
29.	Rotan sabutan unwashed per kwintal		
	kwaliteit III ukuran 8/12 ...	—	HK\$. 41,—
	kwaliteit III/B ukuran 8/12 ...	—	HK\$. 40,—
	kwaliteit IV ukuran 8/12 ...	—	HK\$. 36,—
	kwaliteit IV/B ukuran 8/12 ...	—	HK\$. 28,—
	kwaliteit V ukuran 8/12 ...	—	HK\$. 23,—
30.	Rotan selutup (serawak) W & S per kwintal		
	kwaliteit I ukuran 14—up ...	DM. 55,—	HK\$. 97,—
	kwaliteit II ukuran 14—up ...	DM. 26,—	HK\$. 54,—
	kwaliteit III ukuran 14—up ...	DM. 17,—	HK\$. 29,—
31.	Rotan selutup (serawak) unwashed per kwintal		
	kwaliteit I ukuran 14—up ...	—	HK\$. 93,—
	kwaliteit II ukuran 14—up ...	—	HK\$. 50,—
	kwaliteit III ukuran 14—up ...	—	HK\$. 26,—
32.	Rotan umbulu W & S per kwintal		
	kwaliteit I ukuran 10/24	DM. 25,—	HK\$. 44,—
	kwaliteit II ukuran 10/24	DM. 15,—	HK\$. 29,—
	kwaliteit II/B ukuran 10/24 ...	DM. 12,—	HK\$. 25,—
	kwaliteit III ukuran 10/24 ...	—	HK\$. 16,—

Tudjuan :
Eropa Hongkong

33.	Rotan umbulu unwashed per kwintal		
	kwaliteit I ukuran 10/24 ...	—	HK\$. 41,—
	kwaliteit II ukuran 10/24 ...	—	HK\$. 26,—
	kwaliteit II/B ukuran 10/24 ...	—	HK\$. 22,—
	kwaliteit III ukuran 10/24 ...	—	HK\$. 13,—
34.	Rotan tarumpu W & S per kwintal		
	kwaliteit I ukuran 18/24 ...	DM. 39,—	HK\$. 72,—
	kwaliteit II ukuran 18/24 ...	DM. 34,—	HK\$. 65,—
	kwaliteit II/B ukuran 18/24 ...	DM. 28,—	HK\$. 57,—
	kwaliteit III ukuran 18/24 ...	DM. 21,—	HK\$. 46,—
	kwaliteit III/B ukuran 18/24 ...	DM. 11,—	HK\$. 30,—
	kwaliteit III ukuran 10/18 ...	DM. 16,—	HK\$. 34,—
35	Rotan tarumpu unwashed per kwintal		
	kwaliteit I ukuran 18/24 ...	—	HK\$. 64,—
	kwaliteit II ukuran 18/24 ...	—	HK\$. 62,—
	kwaliteit II/B ukuran 18/24 ...	—	HK\$. 54,—
	kwaliteit III ukuran 18/24 ...	—	HK\$. 43,—
	kwaliteit III/B ukuran 18/24 ...	—	HK\$. 28,—
	kwaliteit III ukuran 10/18 ...	—	HK\$. 30,—

Djakarta, 19 DJULI 1963

PIMPINAN
BIRO LALU LINTAS DEVIS
DIREKTORIUM

ttd.

R.A. KARTADJOEMENA
Ketua

Sambungan halaman 38

20.	MINJAK ETERIS Per LB.		
	minjak sereh minimum 85/35%	Br. pence 35	
	minjak nilam kwaliteit I	Br. pence 159	
	minjak nilam kwaliteit II	Br. pence 146	
	minjak cananga ester 20 up	Br. pence 174	
	minjak akar wangi	E.£. 1/17/—	
21.	KATJANG TANAH KUPAS Per Kwintal.		
	m e r a h	DM. 55,—	
	p u t i h	DM. 64,—	
22.	KATJANG TANAH BERKULIT		
	Per Metric Ton	US\$. 90,—	
23.	INDJUK DIPILIH DIPOTONG BASIS STANDARD		
	30/90 cm. per metric ton	E.£. 210/9/6	
24.	BIDJI KAPOK Per Metric Ton.		
	in bulk	E.£. 12/2/1	
	in bags	E.£. 14/5/3	
25.	AMPAS TAPIOCA Per Kwintal (Kadar Pati Max. 73%).		
	ampas tapioca	DM. 4.50	
	tepung ampas tapioca	DM. 5.40	
26.	GAPLEK Per Kwintal (Ketjuali Lampung).		
	gaplek gelondong	DM. 6,—	
	tepung gaplek	DM. 5.50	
27.	TEPUNG TAPIOCA Per Kwintal.		
	kwaliteit AAA	E.£. 1/3/-	
	kwaliteit AA	E.£. 1/2/-	
	kwaliteit A	E.£. 1/1/-	
28.	PINANG Per Kwintal (Bukan PINANG ATJEH).		
	sliced kwaliteit I	DM. 29,—	
	kwaliteit II	DM. 23,—	
	kwaliteit III	DM. 15,—	

	splits kwaliteit I	DM. 2
	kwaliteit II	DM. 16
	bulat putih	DM. 11
	bulat merah	DM. 10
29.	HEWAN HIDUP Per Ekor.	
	sapi ex Bali	HK\$. 168
	sapi ex Banda Atjeh	HK\$. 140
	sapi ex Lombok	HK\$. 158
	sapi ex Sumba	HK\$. 113
	sapi ex Timor	HK\$. 108
	sapi ex Djawa Timur/Surabaja	HK\$. 110
	kerbau ex Bali	HK\$. 149
	kerbau ex Banda Atjeh	HK\$. 122
	kerbau ex Sumbawa Besar	HK\$. 155
	kerbau ex Lombok, Bima, Sumba, Flores	HK\$. 142
	kerbau ex Djawa Timur/Surabaja	HK\$. 107
	babi	HK\$. 3

30.	GAMBIR Per Kwintal.	
	gambir kembang No. 1	E.£. 19
	gambir bulat	E.£. 16
	gambir persegi hitam (extrac) ...	E.£. 7
31.	DJAGUNG Per Metric Ton.	
	kuning/putih	US\$. 25,—
	m e r a h	US\$. 24,—

Djakarta, 17 Djuli 1963

PIMPINAN
BIRO LALU LINTAS DEVIS
DIREKTORIUM

ttd.

R.A. KARTADJOEMENA
Ketua

Alamat Anda



Untuk

Kain Terpal
Lebar 102 cm
Keluaran:
Negeri Belanda



P_n PANTJA NIAGA

P. N. DHARMA NIAGA

IMPOR : Mesin² untuk Pertjetakan — Industri — Pertanian — Perkebunan — Tekstil.

Mesin² Perkakas — Pendingin — Minjak Kelapa — Pompa² dan Mesin untuk Pembangunan..

Alat² Besar — Kereta Api — Mesin² Pertambangan Clark Forklifts. Mesin² DIESEL/Generating sets — Alat² RADIO/elektronik/Telekomunikasi dan motor² listrik.

PERDAGANGAN UMUM : Dalam Negeri/Antar Pulau.

INSTALASI : Telepon dan listrik dengan tenaga² Ahli.

PERBENGKELAN : Service dan pemasangan mesin.

Kantor Pusat :

Djalan Tanah Abang Barat 6 - 8 - 10 — Djakarta.
P.O. Box 2028 — Tel. 47557 - 47577 - 49978 - 41974
Telex 292

Kantor Tjabang Djakarta

Djalan Djembatan Batu 50 — Tel. 22041 - 22042 - 22043 - 22044
Djakarta Kota.

Tjabang-Tjabang :

BANDUNG — SEMARANG — SURABAJA — MEDAN —
PONTIANAK — PALEMBANG — TJIREBON — JOGJA
KARTA — MALANG — DJEMBER — BANDJARMASIN —
MAKASSAR — MENADO — AMBON — DENPASAR —
BANDA ATJEH — PADANG dan PAKANBARU.

WARTA



Perdagangan

RECEIVED

NOV 11 1966

AP
W299
PH33

18
8

LIBRARY



80

TAHUN KE - XVIII

3 AGUSTUS 1965

MADJALAH „WARTA PERDAGANGAN”

Terbit tiap 2 Minggu sekali

Diterbitkan oleh :

Departemen Perdagangan Dalam Negeri
beserta Urusan Perdagangan Luar Negeri
dari Kompartimen Luar Negeri/H.E.L.N
dan Perdagangan Luar Negeri.

Pelindung :

J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/
Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri
BRIG. DJENDERAL A. JUSUF.

Penasehat :

1. Pembantu Utama Kuasa Menteri Urusan
Perdagangan Luar Negeri
SO EDIRO M.A.
2. Pembantu Utama Menteri Perdagangan
Dalam Negeri
Prof. Dr. ARIFIN ABDURACHMAN.

Pemimpin Umum :

Kepala Direktorat Marketing dan Research :
Ir. J.J. Pitoy M.A.

Staf Redaksi :

Staf Direktorat Marketing dan Research.

Penanggung Jawab :

Kepala Seksi Publikasi Madjalah
Anwar B. Harahap.

Pembantu, Tetap :

Prof. Ir. Teko Sumodiwirjo — Kolonel Jusuf
Ramli — Major A. Rachman Rukmantara —
R. Hertatyanto S.H. — Drs. Waskito —
Dr. J. Panglaykim.

Pembantu Khusus :

Budhiman B.A. — Kolonel Usman Ismail —
Alamsjah S.B.P. — R. H. Tuwaidan M.A. —
Drs. Sjaaf Muchtari — Major Drs Sukadjat
— R. Isa — Drs A. Aidit — Suprpto —
Sudjadi — A. Karim Usman S.H. — Dudy
Djaya.

Alamat Redaksi dan Tata Usaha :

Madjalah „WARTA PERDAGANGAN”
Direktorat Marketing dan Research
Djalan Tanah Abang Timur No. 87
D J A K A R T A

Pelaksana/Pertjetakan :

Kepala Pertjetakan P.N. Karya Tjotas
Burdj Reksodirdjo.

Pembayaran uang langganan dilakukan dimuka dengan :

1. Penjetoran atas Rekening Madjalah
„Warta Perdagangan” Kode No. : KB/
W.A.-194, pada Bank Indonesia --
Djl. : Thamrin, Djakarta.
2. Dinas Giro dan Tjek Pos atau dengan
pos wissel jang langsung dialamatkan
kepada Tata Usaha Warta Perdagangar
Direktorat Marketing dan Research.

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Kata Pengantar Redaksi	1
2. Amanat Menteri Brigdjen A. Jusuf pada : a. Indoktrinasi/Briefing kepada Kepala ² Perwakilan Depperdag.	2
b. Pelantikan Kepala Perwakilan Dep. Perdag. Dalam Negeri/UPLN.	4
c. Musjawarah Kerdja OPS-Impor/Pe- dagang Besar	6
3. Nasakom Bersatu — Nasakom Djiwaku (Amanat Presiden pada pembukaan Mu- bes Tani)	7
4. Lima Azimat adalah inti perdojangan kita (Amanat Presiden pada Pelantikan Lem- baga Hukum Nasional)	12
5. Gudang-Gudang/Ruangan jang perlu dan jang tidak perlu didaftarkan	13
6. Peraturan Pergudangan 1962 (U.U. No. 11 tahun 1965)	14
7. Masalah Pengintegrasian Bank-Bank Pemerintah (Uraian Menteri Urusan Bank Sentral)	17
8. Pengintegrasian Bank ² Pemerintah kedal- am Bank Tunggal "Bank Negara Indonesia"	19
9. Nama ² personalia SEKUM dan Seksi- Seksi tiap ² Perwakilan Depperdag Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri diseluruh Dati I Indonesia	20
10. Penetuban penjelenggaraan pemasukan barang ² dari luar negeri dan penggunaan pelabuhan-pelabuhan	23
11. Kebidaksanaan Impor Barang ² dari Hongkong (Kep. Kotoe No. 51)	25
12. Pentjabutan Undang ² Krisis Impor 1933 (U.U. No. 12 tahun 1965)	27
13. Peraturan Retribusi Biro Lalu Lintas Devisa	28
14. Varia Berita singkat Ekonomi/Perda- gangan Internasional	30
15. Varia Berita singkat Ekonomi/Perda- gangan Dalam Negeri	31-33
16. Djaringan angkutan Laut Samudra Nasional	15
17. Istilah ² Pelajaran	35
18. Pelabuhan di Indonesia jang terbuka untuk perdagangan Internasional	36
19. Indonesia Produsen Lada jang terbesar didunia	38
20. Penetapan Harga penjerahan barang ² Ekspor Golongan II	39

Keterangan Gambar Kulit muka :

Dari kanan kekiri :

Menteri Perhubungan Udara Partono, Wakil
P.M. II Dr J. Leimena, Wakil P.M. I Dr Soebandrio,
Menteri Perdagangan Brig. Djen A. Jusuf, Menteri
Negara H. Aminuddin Azis, Pembantu Menteri Per-
hubungan Laut Harsono S.H., ketika menghadiri
upatjara pelantikan Perwakilan Departemen Perda-
gangan ditiap-tiap Daerah Tingkat I Seluruh In-
donesia jang berlangsung pada tanggal 2-8-'65.
Foto : IPPHOS.

Surat Izin terbit No. 21A/SK/UPPG/SIT-19
tanggal 17-4-1965.

Kata Pengantar Redaksi :

„Nasakom Djiwaku”, demikianlah antara lain amanat PJM Presiden/Pemimpin Besar Revolusi pada rapat raksasa pembukaan Musjawarah Besar Tani seluruh Indonesia, di Stadion utama Gelora Bung Karno, Djakarta, dimana beliau menggembleng langsung kaum Tani; kaum Tani Indonesia jang berdjumlah 72% dari seluruh Rakjat Indonesia. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi menandakan apa sebabnja Kaum Tani disebut Sokoguru Revolusi, tentang tudjuan daripada Revolusi Indonesia jang oleh Presiden ditjakup dengan satu perkataan jaitu ”Amanat Penderitaan Rakjat”.

Supaja kita djangan gumantung kepada siapapun, Presiden memberikan salah satu djimat revolusi jang kita kenal sebagai ”Trisakti” : Berdaulat dalam politik, berdikari dibidang ekonomi, dan berkeperibadian didalam kebudayaan”. Trisakti inilah inti daripada tudjuan Revolusi Indonesia. Agar kita „berdikari” dalam segala bidang, kita harus petjahkan bermacam-macam ikatan, baik ikatan-ikatan riil maupun ikatan-ikatan abstrak.

Menteri Perdagangan Brigdjen A. Jusuf dalam indoktrinasi beliau kepada Kepai-Kepala Perwakilan Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri di Dati I seluruh Indonesia menekankan agar pegawai-pegawai Departemen Perdagangan mendjadi PEMBINA dalam bidang perdagangan dan bukan hanja merupakan administrator atau legislator sadja; agar para petugas mendjadi pentjipta dari keadaan dan bukan korban daripada keadaan. Departemen Perdagangan bukan merupakan tempat penampungan daripada ambtenaar-ambtenaar jang birokrat.

Retooling atau sanering dalam bidang personalia kearah efisiensi arganisasi dan pelaksanaan tugas adalah suatu hal jang biasa di negara manapun djuga. Menteri meneg-gaskan pula, bahwa selama belum tertjapai efisiensi dan kelantjaran dalam pekerdjaan, retooling dan sanering akan tetap didjalankan. Menteri Brigdjen A. Jusuf akan selalu menilai seseorang itu dari kegiatan-kegiatannja setjara fungsional objektif, tidak perduli seseorang itu dari unsur mana, asal dari mana, suku apa dsb. Selandjutnja Menteri mengandjurkan, bahwa dalam situasi sekarang kita harus mem-bantu mengembangkan keradjinan tangan dan industri, baik industri mesin maupun industri tangan. Kita harus berusaha untuk menggali dan menemukan commodities baru.

Untuk mentjegah adanja tafsiran-tafsiran jang berbeda-beda mengenai gudang-gudang/ruangan mana jang perlu dan jang tidak perlu didaftarkan bertalian dengan telah diundangkannja Undang-Undang No. 11 tahun 1965, dalam nomor ini disadjikan pendjelasan-pendjelasan mengenai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tsb. yakni tentang gudang/ruangan mana jang perlu dan jang tidak perlu didaftarkan.

Perombakan daripada struktur perbankan di Indonesia menudju kearah sistim dan struktur perbankan jang bersifat tunggal adalah sebagai akibat dari keharusan adanja keterarahan dalam bidang perbankan, sehingga oleh karenanja diperlukan satu komando, demikian uraian Menteri Urusan Bank Sentral mengenai masalah pengintegrasian Bank-Bank Pemerintah.

Pembentukan suatu Bank Tunggal adalah guna menjederhanakan struktur per-bankan di Indonesia. Dengan demikian perbankan lebih dapat dimanfaatkan sebagai salah satu aparat dalam melaksanakan sistim ekonomi terpimpin dan terarah, dan dapat-lah lebih mudah dilakukan penjaluran, pengawasan, dan penggunaan dana⁹ setjara efisien dan efektif. Djuga penjebaran-penjebaran tenaga ahli perbankan untuk memper-luas djaringan perbankan, guna pengaturan sistim pembajaran dan lalu-lintas uang jang lebih terpimpin dan terorganisasikan.

Djadilah „PEMBINA” dan bukan hanja Administrator dan Legislator sadja

DJADILAH PENTJIPTA DARIPADA KEADAAN BUKAN KORBANNJA.

Mendahului pelantikan daripada para Kepala Perwakilan Departemen Perdagangan Dalam Negeri/ Urusan Perdagangan Luar Negeri di Daerah Tingkat I, J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri Brigdjen. A. Jusuf telah berkenan untuk memberikan indoktrinasi kepada para Kepala Perwakilan tsb. pada tgl. 30 Djuli 1965, bertempat di Departemen Perdagangan — Djakarta.

Dalam permulaan pidatonja itu Menteri Jusuf menggambarkan keadaan Departemen Perdagangan yang sudah sangat disintegrated dan se-olah-olah hanja merupakan tempat penampungan daripada ambtenaar² jang birokratis sadja sehingga telah diadakan retooling dan reorganisasi besar-besaran, demi mempertinggi efisiensi dan kelantjaran kerdja. Kita harus mentjiptakan suatu mekanik jang efisien jang dapat menggerakkan roda perdagangan dengan lantjar sehingga dengan demikian meratakan djalan menuju Masyarakat jang Adil dan Makmur. Untuk melaksanakan hal ini kita membutuhkan manusia² jang bukan birokratis, manusia² jang berani bertindak tidak hanja berdasarkan backing tertentu akan tetapi atas tanggung djawab sendiri demi kepentingan masyarakat.

Irama revolusi menghendaki personalia jang demikian, manusia² jang mendjadi pentjipta daripada keadaan, bukan korbannja. Pegawai² Departemen Perdagangan supaja mendjadi pembina dalam bidang perdagangan dan bukan hanja merupakan Administrator atau Legislator sadja. Demikian ditandakan oleh Menteri Jusuf jang selandjutnja mengatakan bahwa hendaknja dasar dari segala tindakan kita adalah melihat pada kebutuhan pada suatu waktu demi kepentingan masyarakat. Retooling atau sanering² dalam bidang personalia dan materi djanganlah dianggap sebagai suatu hal jang tak baik, tetapi hendaknja dipandang sebagai suatu „way out” bagi bibit² muda untuk berkembang dalam Departemen Perdagangan.

Dan selama belum tertjapai efisiensi dan kelantjaran dalam pekerdjaan, akan terus diadakan retooling dan sanering². Ditandakan pula oleh Menteri bahwa beliau selalu menilai seseorang itu dari kegiatan²nja setjara fungsionil objektif. „Saja tak perduli saudara itu dari unsur mana, asal dari mana, suku apa, apakah dekat dengan saja atau tidak; saja akan menilai saudara menurut kegiatan jang saudara lakukan, djadi saja beoordenen (menilai) saudara setjara fungsionil objektif”.

Agar mempunjai landasan jang kuat kita harus mengabdikan kepada kepentingan umum, djadikanlah



J.M. Menteri Perdagangan Brigdjen. A. Jusuf.

tujuan Masyarakat jang Adil dan Makmur suatu basis jang kuat. Untuk mentjapai Sosialisme Indonesia Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno telah menggariskannja dalam suatu filsafah jang mendjadi Filsafah Negara yakni Pantja Sila. Kita hanja akui satu orang sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia yakni Bung Karno.

Dengan demikian adjaran² beliau pun harus kita pegang teguh, apalagi sebagai pedjabat Pemerintahan. Hendaknja kita bina agar dalam organisasi jang akan kita kembangkan, agar supaja didalamnya benar² terdjadi kristalisasi dari Nasakom. Menteri Achmad Jusuf mengingatkan bahwa mengabdikan pada kepentingan umum bukanlah berarti mengabdikan pada kepentingan diri sendiri atau pada suatu golongan tertentu. Menteri djuga sangat menentang orang jang bekerdja demi kursi (djabatan) jang diduduki. „Saja tidak mentjari ambtenaar”, demikian Menteri, „jang saja tjari adalah orang² berdjiwa pemimpin jang dapat bertindak melantjarkan djalannja roda perdagangan tanpa ada backing dari siapapun”.

Fungsi Perdagangan adalah sangat penting dalam situasi sematjam sekarang demi pembiajan Revolusi ini. Dengan demikian hendaknya segala sesuatu yang menghambat kelantjaran dihilangkan. Dalam menjiptakan peraturan² harus kita selalu melihat kondisi² dan keadaan yang berlaku setempat untuk kemudian melakukan penjesuaian. Tiap daerah tentu mempunyai kondisi²nja yang khas; adalah tugas daripada Kepala² Perwakilan Departemen Perdagangan untuk melaksanakan peraturan² yang berasal dari pusat yang kemudian disesuaikan dengan keadaan setempat. Asal saja tidak menjimpang dari garis kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan pusat.

Menteri menekankan agar dalam melaksanakan tugas masing², supaya menjauhkan sifat birokratis dan jiwa bordjuis. Tjiptakanlah suatu tjara kerdjama yang integrated dengan penguasa setempat (locale authorities) dengan tetap berpegang teguh pada garis umum yang telah ditetapkan oleh Departemen Perdagangan.

Hal lain yang penting dalam kepemimpinan adalah karakter seseorang, beranikah dia memimpin atau tidak. Seorang pemimpin harus dapat menanamkan kepada bawahan suatu perasaan tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat. Pemimpin tersebut harus bekerdja dengan „devotion” dan „dedication”.

Adalah ditangan saudara² apakah perwakilan² Departemen Perdagangan di daerah² dapat atau tidak dapat membawakan manfaat bagi masyarakat daerah, demikian Menteri berkata. Selama bertindak demi kepentingan masyarakat, tak perlu melihat kekiri atau kekanan sebab masyarakat sendirilah yang nanti akan menilai tindakan² saudara itu.

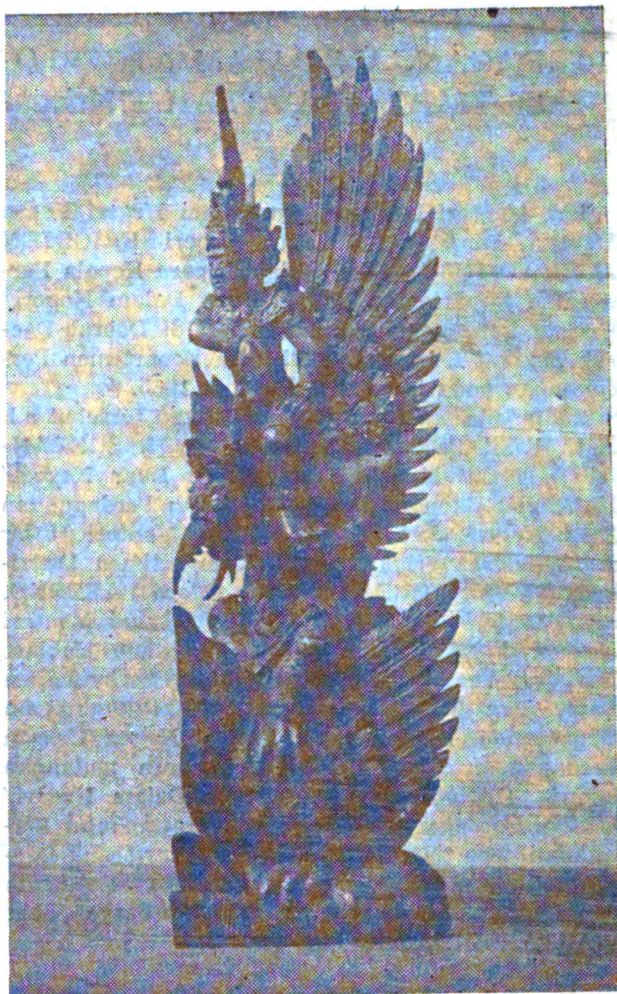
Peganglah ini sebagai suatu doktrin.

Dalam mengadakan konperensi kerdja, djanganlah menelorkan resolusi² belaka melainkan telorkanlah hasil² yang konkrit. Djalankanlah open management agar masyarakat daerah dapat menilai sendiri para kerdja saudara² simpati masyarakat setempat arena tindakan² kita, bukan karena pidato² atau resolusi. Djanganlah menjadikan dirimu sebagai „untouchable” yang mengurung dirinja dibelakang peraturan² dan prosedur².

Departemen Perdagangan, termasuk petugas²nja mempunyai hak hidup djustru oleh karena ada orang yang berniaga, bukan sebaliknya. Sebagai „public servants” kita harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada umum. Kita harus pula berani melakukan self kritik dan mengoreksi diri sendiri. Yang penting adalah kegiatan² yang didasarkan pada logika dan disesuaikan dengan keadaan dan realitas.

Djanganlah segan untuk berkonsultasi dengan para pedagang yang bonafide apabila hendak merumuskan ketentuan², yang adjusted pada kondisi² yang berlaku seraja dapat dipertanggung djawabkan. Kita tak boleh berdjawa dogmatis akan tetapi pada hak yang lain harus benar² menguasai materi sehingga dapat kita membina bidang perdagangan.

Menteri menetapkan pola² nasional berdasarkan Indonesia sebagai political dan economical unit, se-



dangkan yang nanti harus menghadapi persoalan² dan menjelesaikannya untuk tiap² daerah tingkat I adalah para Kepala² Perwakilan.

Dalam situasi sekarang kita harus bantu mengembangkan keradjinan tangan dan industri, baik industri mesin maupun industri tangan. Kita harus berusaha untuk menggali dan menemukan commodities baru.

Hendaknya kita dapat mewariskan nanti suatu mekanik yang berdjalan lantjar dan efisien kepada generasi yang akan datang. Utamakanlah „survival of the organisation” diatas kepentingan sendiri. Lakukanlah pembinaan yang sehat dengan membentuk suatu forum untuk mengabdikan pada Negara dan djanganlah forum ini dijadikan forum untuk machtsvorming.

Djalankanlah suatu practical leadership dengan memikirkan nasib bawahan, terutama tjiptakanlah kondisi² yang adil bagi yang dipimpin. Djuga hubungan yang erat dengan semua oknum yang berketjimpung dalam bidang perdagangan didaerah perlu dipupuk sebaik-baiknya. Hal ini dapat ditjapai dengan menjalakan suatu open management, bekerdja setjara djudjur dan terus terang. Achirnja Menteri menjerukan agar para Kepala perwakilan hendaknya menjadi orang² yang mempunyai kepribadian dan kewibawaan untuk mengabdikan kepada revolusi.

UPATJARA PELANTIKAN KEPALA-KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI/URUSAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI DI TIAP-TIAP DAERAH TINGKAT I PADA TANGGAL 2 AGUSTUS 1965

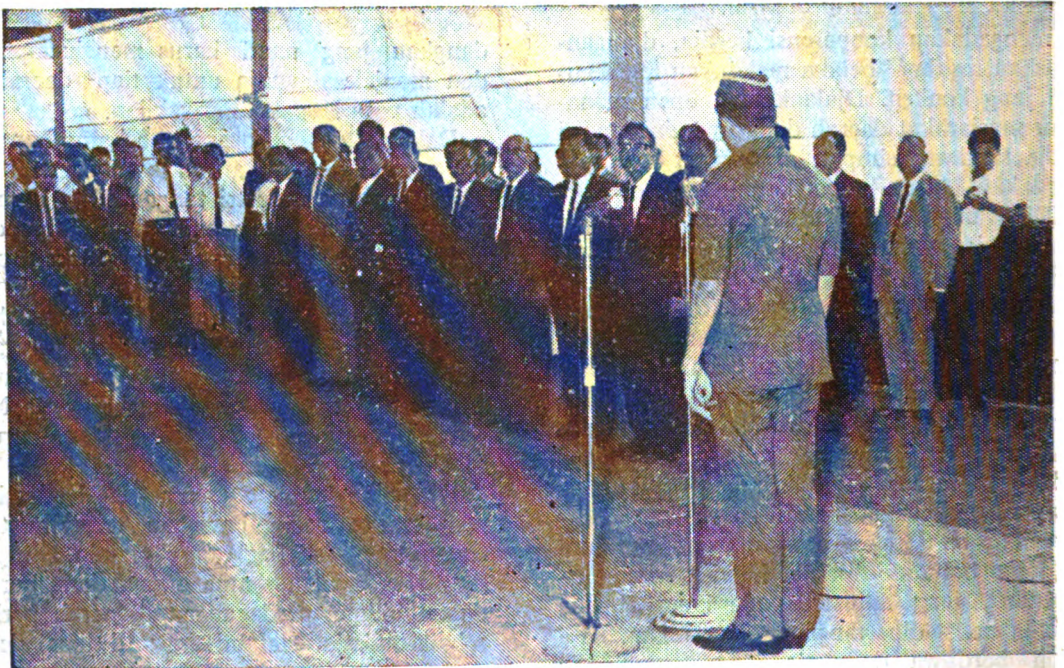
J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri BRIGDJEN ACHMAD JUSUF telah melantik para Kepala Perwakilan Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri di Daerah-Daerah Tingkat I, bertempat di Aula Departemen Perdagangan pada tanggal 2 Agustus 1965.

Hadir pula pada upatjara pelantikan tersebut a.l. J.M. Wakil Perdana Menteri I Dr H. SOEBANDRIO selaku Menko Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri, J.M. Wakil Perdana Menteri II Dr J. LEIMENA selaku Menko Kompartimen Distribusi, J.M. Menteri Perhubungan Udara PARTONO, J.M. Menteri AMINUDDIN AZIS sebagai Menteri Negara diperbantukan kepada Presidium Kabinet Dwikora, Pembantu Utama Menteri Perhubungan Laut, para Kepala Direktorat dalam lingkungan Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri serta para undangan lainnja. Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri mempunyai Perwakilan pada tiap Daerah Tingkat I termasuk Daerah Istimewa Atjeh, Daerah Istimewa Jogjakarta dan Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya (lihat WARTA PERDAGANGAN No. 7).

P I D A T O

J.M. MENTERI BRIGDJEN A. JUSUF PADA UPATJARA PELANTIKAN.

Menteri Brigdjen A. JUSUF dalam pidato pelantikannya menekankan bahwa dari para Kepala Perwakilan diharapkan agar dapat menjalankan tugasnja bersandarkan adanya suatu „leadership” yang „capable” kompeten disamping sanggup bekerja dengan penuh dedication; suatu „leadership” yang mengembangkan suatu „pushing force” dalam pembinaan organisasi Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri. Beliau mengamanatkan agar para Kepala Perwakilan benar-benar menjadi pembina yang aktif dan positif dalam bidang perdagangan. Achirnja dalam pidato pelantikannya yang singkat, Brigdjen A. JUSUF menandakan bahwa hendaknya pekerjaan itu dilakukan demi perkembangan organisasi jaksa Organisasi Departemen yang bisa mengabdikan kepada masyarakat dan menjalankan policy Pemerintah dalam bidang perdagangan demi tertjapainja masyarakat yang adil dan makmur.



J.M. Menteri Perdagangan Brigdjen. A. Jusuf ketika melantik Kepala-kepala Perwakilan Deperdag Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri di tiap-tiap Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, mengamanatkan agar para Kepala Perwakilan benar-benar djadi pembina yang aktif dan positif dalam bidang perdagangan (foto: IPPHOS).



W.P.M. I Dr. Soebandrio dalam rapatja Pelantikan Perwakilan Departemen Perdagangan di tiap² Dati I. (IPPHOS)

P I D A T O

J.M. WAKIL PERDANA MENTERI I DR H. SOEBANDRIO

W.P.M. I Dr H. SUBANDRIO selaku Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri mengamanatkan bahwa kita sesuai dengan abad ke-XX harus menanamkan djiwa ekonomi yang bersendikan „devotion” dan „dedication”, „skill” serta pengalaman. Kalau kita melihat pada tumbuhnja Revolusi maka kita akan dapati dialog dalam semua bidang, demikian pula pertumbuhan tiap bangsa dan negara dalam abad ke-XX lain daripada masa sebelumnja. Ada djuga yang ber-tumbuh atas dasar abad imperialisme dan kolo-nialisme, bertumbuh „in the wake of imperialist mentality and mentality”. Akan tetapi yang ber-tumbuh demikian hanja akan mendjadi satelit elaka.

Hendaknja para Kepala Perwakilan mengambil dasar menjesuaikan diri dengan djiwa Revolusi yang mendjadi djuga Revolusi ummat manusia. Sebagai pelaksana-pelaksana Departemen Perdagangan di Daerah para kepala Perwakilan harus mengembangkan genialita-nja. Pelaksanaan harus disesuaikan dengan keadaan yang berlaku di Daerah. Diandjurkan pula untuk memeras otak dengan cara bagaimana menggali semua kekajaan serta dapat memasarkannja. Semua ini harus ditetapkan dalam genealita kita. Selandjutnja Dr Subandrio mengatakan bahwa terutama dalam situasi kon-frontasi pada dewasa ini, faktor manusia mempunjai peranan yang sangat penting. „The value of human being” tak ternilai, lebih-lebih dalam dunia perdagangan kita harus membentuk suatu manusia baru. Sebab, perbaikan perekonomian Indonesia tak dapat dilepaskan daripada konfrontasi terhadap neokolonialisme, kolonialisme dan imperialisme. Kita perlu mengembangkan genealita dalam segala

bidang, bidang ekonomi, bidang moneter, bidang produksi dan lain-lain. Semua ini harus diselesaikan dengan menetrapkan genealita kita dan tidaklah akan dapat diselesaikan dengan angka-angka sadja.

Achirnja Dr H. SUBANDRIO mengutjapkan selamat bekerdja dan mengingatkan bahwa „the nation is expecting your success”.

P I D A T O

J.M. WAKIL PERDANA MENTERI II DR J. LEIMENA

W.P.M. II Dr J. LEIMENA selaku Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi, jang menjinggung distribusi antara lain mengatakan, bahwa distribusi berarti untuk menjalurkan dengan merata barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari dengan harga yang lajak kepada masjarakat. Dalam menghadapi persoalan distribusi kita semuanja sadar bahwa hal ini merupakan suatu rentetan kegiatan yang menjakupi persoalan-persoalan yang serba kompleks sifatnja seperti misalnja persoalan-persoalan persediaan, penjaluran, pengadaan, pengangkutan, pembentukan harga dan lain-lain sebagainya.

Selandjutnja Dr Leimena mengatakan bahwa Pemerintah sekarang sedang mendjalankan prinsip dekonsentrasi dimana Pemerintah menempatkan orang-orang yang kompeten di daerah untuk meng-„handle” segala sesuatu yang sesuai dengan keadaan dan kondisi per tiap Daerah tertentu. Demikian hendaknja landasan kerdja para Kepala Perwakilan didasarkan kepada prinsip tersebut dan setjara insaf dan sadar harus berusaha untuk mempertinggi efisiensi kerdja di Daerah. Dalam hal ini, demikian Dr J. LEIMENA mengachiri amanatnja, petugas² di Daerah sama pentingnja dengan petugas² di Pusat.



Wakil P.M. II Dr. J. Leimena ketika memberi amanat di-depan para Perwakilan Departemen Perdagangan di tiap-tiap Dati I. Dalam gambar tampak kepala-kepala Direktorat dalam lingkungan Dep. Perdagangan Dalam Negeri dan Urusan Perdagangan Luar Negeri. (IPPHOS)

PEMBERITAAN PERS IBU-KOTA MENGENAI:

PRASARAN MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI BRIGDJEN ACHMAD JUSUF DIHADAPAN OPS IMPOR PEDAGANG BESAR SELURUH INDONESIA.

Sehubungan dengan prasaran J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri pada pembukaan musjawarah kerdja Badan Pengurus Pleno Pusat OPS-Impor Pedagang Besar Indonesia pada tanggal 27-7-1965, dibawah ini kami muat tjukilan-tjukilan pemberitaan dari pers ibu-kota mengenai prasaran Menteri tsb.

Dibawah djudul "PARA IMPORTIR SUPAJA SADARI TUGAS DAN KEWADJIBANNJA" harian "Berita Yudha" menulis a.l. bahwa Menteri Jusuf "menandaskan bahwa para importir nasional swasta menjadari benar-benar tugas dan kewadajibannja sebagai sokoguru revolusi dan menjadipula fungsi impor untuk kesedjahteraan rakjat banjak. Para importir nasional swasta dapat mengoreksi diri sendiri dan membersihkan oknum-oknum diantara mereka jang njata-njata mengahambat djalannja revolusi."

Mengenai impor dikatakan "Dalam melaksanakan impor hendaknja para importir tidak lagi melakukan impor dari barang-barang jang tidak ada gunanja bagi kepentingan rakjat banjak seper barang-barang lux". Tetapi, demikian "Berita Yudha", hendaknja impor iu diarahkan kepada pelaksanaan barang-barang jang dapat membawakan manfaat bagi projek-projek Mandataris, Conec misalnja atau impor tekstil dll. jang "dirasakan langsung manfaatnja oleh rakjat banjak dan dapat djadikan usaha untuk memberantas manipulator....."

"FUNGSI IMPOR ADALAH STABILISASI HARGA" demikian djudul harian "Sinar Harapan" dalam terbitannja tgl. 27 Djuli 1965, dalam mana dinjatakan pendapat Menteri Jusuf "bahwa fungsi impor adalah flow of goods tetap kontinu sehingga diperoleh stabilisasi harga dipasaran". Selanjutnja dalam tulisan tersebut dikatakan "Untuk itu Menteri mengharapnka agar importir selekas mungkin melaksanakan setiap izin impor jang diperoleh. Ditandaskan oleh Menteri bahwa importir hendaknja bekerdja setjara realistis dan melihat barang mana jang harus dan betul-betul bermanfaat bagi kepentingan Rakjat dalam mengamankan kebutuhan masjarakat, projek Mandataris MPRS dan kepentingan pembangunan lainnja."

"Warta Bhakti" dibawah djudul "FUNGSI IMPOR UNTUK PRODUKSI" menulis bahwa Menteri dalam kata sambutannja mengatakan "bahwa impor barang-barang harus ditudjukan kepada kebutuhan Revolusi dan pengabdian kepada masjarakat". Selanjutnja ditulis "Ditambahkannja bahwa dibidang perdagangan semua warganegara Indonesia mempunjai hak dan tugas jang akan tetapi dibidang ini masih terdapat pikiran-pikiran jang rasialis."

"Ekonomi Nasional": Menteri Perdagangan Brigdjen A. Jusuf:

"IMPORLAH BARANG-BARANG JANG DIBUTUHKAN REVOLUSI DAN RAKJAT".

a.l. ditulis: "agar para importir membina dan mejakini pentingnja fungsi impor dalam rangka mewujudkan masjarakat Indonesia jang adil dan makmur. Dalam hubungan ini Menteri mengandjikan supaya para importir mengutamakan impor barang-barang jang dibutuhkan masjarakat dan revolusi."

"Dalam usaha mempertjepat masuknja barang-barang tsb. Menteri mendjandjikan akan memberikan bantuan baik mengenai hal perizinan maupun pendobrakan terhadap ketidak lantjaran pemasukan barang-barang tsb."

LKBN Antara a.l. menulis: "Dalam pada itu Menteri Perdagangan Brigdjen A. Jusuf dalam datonja menegaskan dalam menentukan harga dalam pasaran internasional djangan berdasar pada djiwa komissioner tapi benar-benar mendjadi pedagang."

Demikianlah a.l. pers ibukota mengenai prasaran Menteri Brigdjen A. Jusuf tersebut diatas.

NASAKOM BERSATU — NASAKOM DJIWAKU

Amanat Presiden Sukarno pada rapat raksasa Pembukaan Musjawarah Besar Tani seluruh Indonesia di Stadion Utama Gelora „Bung Karno”, Senajan, Djakarta, pada tanggal 20 Djuli 1965.

Saudara-Saudara sekalian,

Mubes Tani, Musjawarah Besar Tani. Saja di-
inta memberi amanat. Lebih baik amanat saja itu
ja tudjukan langsung kepada kaum tani Indonesia,
lak terutama sekali kepada Mubesnja, oleh karena
ubesnja itu sudah terdiri dari orang² djempolan,
ukan? Apalagi jang duduk disini, tjoba lihat, se-
uanja djempolan². Saja akan tudjukan amanat saja
i kepada kaum tani Indonesia, khusus kepada kaum
ni Indonesia.

Saudara-saudara kaum tani Indonesia, sajalah jang
enamakan **kaum tani sokoguru Revolusi**,
si, disamping **kaum buruh adalah**
sokoguru Revolusi. Apa sebab saja mem-
amakan Saudara-saudara kaum tani sokoguru
evolusi? Saudara mengerti sokoguru itu apa? Soko-
guru berarti tiang, sokoguru adalah tiang utama. Misalnja
pendopo, sesuatu pendopo, — Saudara pernah me-
tat pendopo, bukan, pendopo Kabupaten, pendopo
kedudukan, pendopo Ketjamatan, pendopo dilain-
tempat —, pendopo² itu mempunyai banjak
ng², mungkin sepuluh, duapuluh, tigapuluh,
empatpuluh tiang². Kata orang Djawa, tiang²nja itu
k². Tiang², tetapi tiap² pendopo mempunyai
empat tiang jang terpenting, mempunyai empat soko-
guru, — jang ditengah itu —, tiang empat daripada
pendopo, empat sokoguru daripada pendopo. Ini
adalah tiang² jang terpenting. Djikalau salah-satu
ripada empat tiang ini gugur, gugurlah sama sekali
uruh pendoponja.

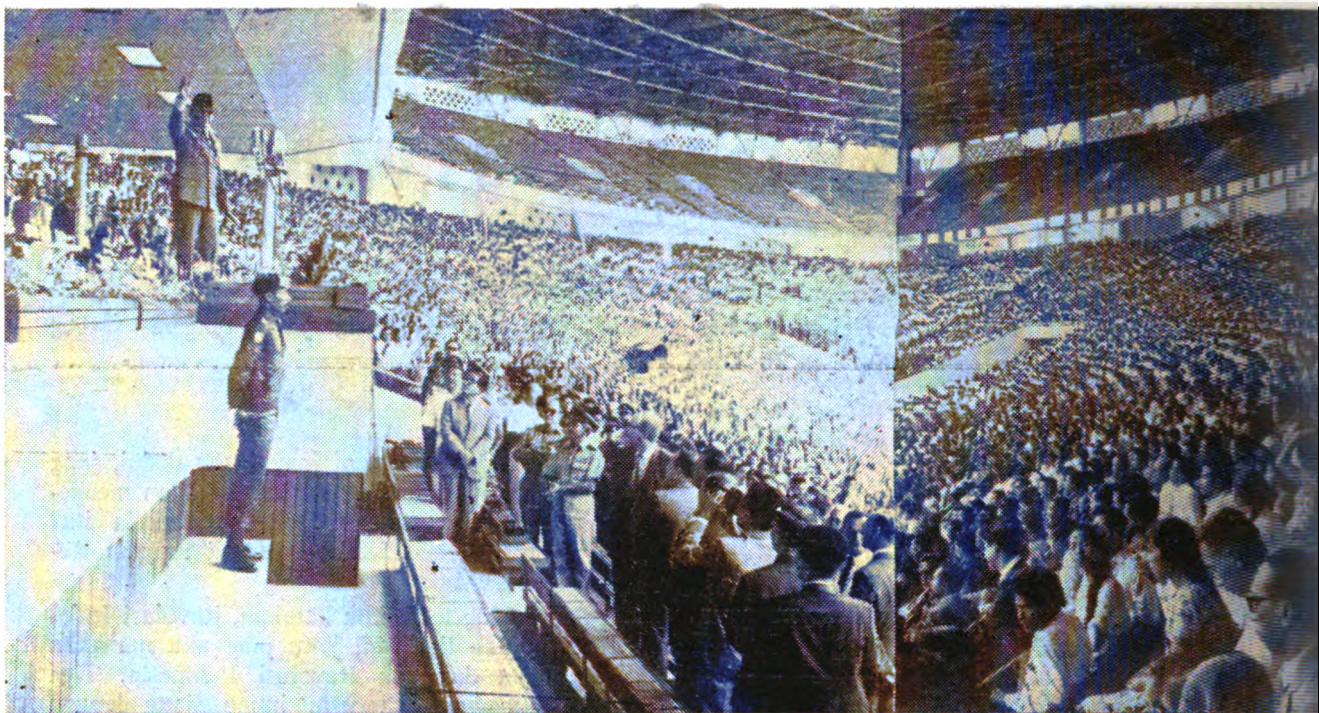
Nah, Revolusi Indonesiapun mempunyai sokoguru².
ripada **sokoguru² Revolusi Indo-**
sia ini dua adalah amat penting
tu sokoguru buruh, sokoguru tani.
tinja, djikalau Revolusi Indonesia itu tidak dija-
kan, tidak terpikul, tidak dilaksanakan oleh kaum
ruh, dia akan gugur — Revolusi itu —, djikalau
ak didjalankan, tidak dipikul, tidak dilaksanakan
h kaum tani, gugurlah Revolusi itu. Nah itulah
abnja maka saja katakan, kaum tani adalah
oguru daripada Revolusi Indonesia.

Revolusi Indonesia itu bertudjuan apa, Saudara?
a tudjuannya Revolusi Indonesia? Hah, kaum
i, sudahkah engkau sekalian mengetahui tudjuan
ripada Revolusi kita ini, tudjuan daripada Revo-

lusi Indonesia? Kaum tani jang hadir disini, jang
tidak hadir disini, sudahkah engkau sekalian menge-
tahui tudjuan daripada Revolusi Indonesia itu?
Sudahkah engkau sekalian mengetahui tudjuan Re-
volusi Indonesia itu?

Berulang-ulang telah kita katakan, Revolusi Indo-
nesia bertudjuan tiga hal, jaitu jang aku namakan
tiga kerangka daripada Revolusi Indonesia. Tiga
kerangka Revolusi Indonesia inilah, jang dengan
satu perkataan aku tjakup dengan Amanat Penderi-
taan Rakjat. Tiga kerangka, tiga tudjuan daripada
Revolusi Indonesia itu ialah : Pertama, satu negara
Republik Indonesia jang berwilajah kekuasaan dari
Sabang sampai Merauke, berdaulat penuh, berbentuk
Republik kesatuan. Ini adalah tudjuan pertama dari-
pada Revolusi Indonesia. Tudjuan jang kedua dari-
pada Revolusi Indonesia ini ialah, satu masjarakat
Indonesia jang adil dan makmur, tanpa exploitation
de l'homme par l'homme, satu masjarakat jang adil
dan makmur, tjukup sandang tjukup pangan, gemah-
ripah loh-djinawi. Ini adalah tudjuan kedua. Tudjuan
ketiga dari pada Revolusi Indonesia ialah suatu dunia
baru, satu susunan baru diseluruh bumi ini, dimana
seluruh umat manusia berbahagia, satu dunia baru
tanpa exploitation de l'homme par l'homme, kataku,
satu dunia baru tanpa penghisapan manusia atas
manusia, satu dunia baru tanpa penghisapan bangsa
atas bangsa. Ini adalah tudjuan daripada Revolusi
Indonesia, jang dengan satu perkataan aku katakan,
ini adalah Amanat Penderitaan Rakjat.

Nah, oleh karena aku bitjara kepada kaum tani,
kaum tani didesa-desa, kaum tani dilereng-lereng
gunung, kaum tani dekat dari sini, kaum tani djauh
dari sini, maka hendak aku tjeritakan terlebih dahulu
apa sebab aku namakan Amanat Penderitaan Rakjat.
Rakjat Indonesia dalam apa jang dinamakan gerakan
rakjat Indonesia untuk menudju sesuatu hal, telah
menderita habis-habisan. Tudjuannya apa? Tudjuannya
ialah pertama ingin mempunyai negara sendiri
jang berdaulat, jang merdeka penuh, jang berbentuk
Republik berwilajah kekuasaan antara Sabang dan
Merauke. Tudjuan daripada gerakan rakjat itu ialah
untuk satu masjarakat Indonesia jang adil dan mak-
mur tanpa penghisapan, tanpa kemiskinan, tanpa
kemudharatan, tanpa kemelaratan, tanpa hidup jang
tidak lajak. Tudjuan ketiga daripada gerakan rakjat



Presiden Sukarno pada rapat raksasa Pembukaan Mubes Tani seluruh Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 20 7 - '65 di Stadion Utama Gelora „Bung Karno”, Djakarta, menggembelng langsung Kaum tani didesa-desa, dilereng-lereng gunung diseluruh Indonesia.

Indonesia itu ialah satu dunia baru sebagai kukatakan tadi. Nah ini adalah tudjuan daripada gerakan rakjat Indonesia sedjak berpuluh-puluh tahun, sedjak dari djamannja Sultan Agung Hanjokrokusumo, sedjak daripada djamannja Diponegoro, sedjak dari djamannja kita mengadakan partai² politik, tetapi tudjuan daripada seluruh gerakan rakjat Indonesia adalah itu.

Dan untuk mentjapai, memperdjoangkan tudjuan ini Rakjat Indonesia telah menderita dan berkorban sehabis-habisnja. Menderita dan berkorban, menderita peidjara, menderita Boven-Digul, menderita segala kesengsaraan didalam Revolusi phisik, menderita membakar rumahnja sendiri, menderita kehilangan suami, menderita kehilangan istri, menderita kehilangan anak, menderita kehilangan radjakaja, pendek menderita, menderita, menderita. Achirnja Saudara-saudara, gerakan rakjat ini datang kepada satu saat jang kita bisa memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi dengan adanja proklamasi 17 Agustus 1945 itu, tudjuan daripada gerakan rakjat ini belum tertjapai seluruhnja. Baru kita bisa mengadakan proklamasi, tetapi tudjuan jang lain² belum tertjapai.

Nah, Rakjat seakan-akan mengamanatkan kepada kita, kepadaku, kepadamu, kepadamu, kepadamu, kepadamu, kepadamu, kepadamu, kepada kita semuanya, agar supaja penderitaan Rakjat jang berpuluh-puluh tahun ini kita tebus, kita djadikan satu

realita, tudjuan daripada penderitaan ini. Rakjat laksana mengamanatkan kepada Pak Chairul Saleh kepada Pak Leimena, kepada Pak Nasution, kepada Pak Yani, kepada Pak Asmu, kepada Pak Bambang Murtijoso, kepada Pak Suprajogi, kepada Pak Surjadi kepada Ibu Subandrio, kepada Ibu Rusiah Sardjono kepadaku, kepadamu, kepadamu, kepadamu, kepadamu, kepada kita sekalian : Hai, hai orang Indonesia jang hidup dalam keadaan sekarang ini, hai orang Indonesia dalam generasi sekarang ini, hai orang Indonesia sekarang ini, landjutkanlah perdjoangan kita, landjutkanlah perdjoangan kita jang kita telah djalankan dengan penuh penderitaan landjutkan, berusahalah, berdjoanglah, peraslah engkau punja tenaga dan keringat, agar supaja negara Republik Indonesia jang berwilajah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke mendjadi negara jang kuat Republik jang kuat, Republik jang berdaulat, Republik jang disegani dan dihormati oleh seluruh um manusia didunia ini. Berdjoanglah terus, berichtilah terus, bantinglah tulangmu terus, peraslah keringatmu terus, agar supaja kita bangsa Indonesia ini, semuanya 105 djuta manusia, hidup didalam kebahagiaan, tidak hidup ketjingkrangan, tidak hidup didalam kekurangan, tidak hidup tertindas, tidak hidup dalam kemudratan, pendek, hidup sebagai kita tjita-tjita dari djaman dahulu pula, hidup didalam keadaan gemah-ripah loh-djinawi, tata-tentrem kartarahard

Hai, manusia Indonesia jang hidup sekarang ini kami rakjat Indonesia tadinja telah berpuluh-puluh tahun menderita, menderita tiang penggantung

menderita bui, menderita pendjara, menderita pem-
punguan Boven-Digul, menderita, menderita, men-
derita, menderita, untuk mentjapai satu masjarakat
jang adil dan makmur. Teruskanlah usaha ini, terus-
tanlah perdjoangan ini. Aku jang telah meninggal
dunia, aku generasi jang terdahulu, aku amanatkan
kepadamu, aku amanatkan kepadamu, agar supaja
engkau berdjoang terus, bekerdja terus, membanting
ulang terus, agar supaja apa jang kita tjita-tjitakan
itu tertjapai. Demikian pula diamanatkan kepada
kita agar supaja kita ini berdjoang terus, bekerdja
terus, agar supaja dunia jang bobrok ini, dunia jang
penuh dengan setan² ini, mendjadi suatu dunia baru,
tidak ada didalamnja penghisapan oleh manusia atas
manusia, tidak ada didalamnja penghisapan bangsa
atas bangsa.

Nah, hai kaum tani Indonesia, merasakah engkau
bahwa amanat itu terletak djuga diatas pundak-
pundaknja kaum tani, diatas pundakmu, pundakmu,
pundakmu, kataku, tetapi djuga diatas pundaknja
kaum tani, diatas pundak kita sekalian Rakjat Indo-
nesia dari Sabang sampai Merauke?

Nah, Saudara-saudara, bukan sadja oleh karena
kaum tani berdjumlah 72% daripada seluruh Rakjat
Indonesia, bukan sadja itu, bukan sadja karena itu
saja aku katakan bahwa kaum tani adalah sokoguru
daripada Revolusi Indonesia, tetapi djuga oleh
karena tjita-tjita Revolusi Indonesia ini hanjalah bisa
terlaksana dengan keringatnja kaum tani pula.
Djikalau tidak dengan keringat kaum tani, mana bisa
kita mentjapai masjarakat jang adil dan makmur,
tukup sandang, tjukup pangan, gemah-ripah loh-
mawi. Tidak bisa, Saudara-saudara. Mana pemim-
pin jang berani mengatakan bahwa ia bisa meng-
gerakan satu masjarakat jang adil dan makmur tanpa
kaum tani? Mana pemimpin kaum buruh jang berani
mengatakan bahwa ia bisa mendatangkan satu masja-
kat jang adil dan makmur hanja dengan tenaga
kaum buruh sadja? Djikalau tidak dengan tenaga kaum
tani pula? Tadi pak Leimena telah berkata, bukan,
sandang-pangan, sandang-pangan, sandang hanja
saja terlaksana djikalau dikerdjakan oleh kaum tani
pula. Pangan apa lagi, hanja bisa terlaksana diker-
jakan kaum tani. Maka oleh karena itu aku ber-
kata, kaum tani adalah sokoguru daripada Revolusi
Indonesia. Dan Revolusi Indonesia itu. Saudara-
saudara, bertudjuan tiga hal sebagai kukatakan tadi.

Hal jang pertama ialah satu negara Republik Indo-
nesia jang bebas merdeka, bebas merdeka, Kita ini
manja, Saudara-saudara, telah merdeka, telah
merdeka, tadinja kita tidak merdeka. Maka oleh
karena itu kita lantas berdjoang untuk mentjapai
merdeka. Tadinja kita tidak merdeka. Kita
berdjoang untuk mendjadi merdeka. Apa sebab
kita tidak merdeka, Saudara-saudara? Tiap²
kaum tani mengerti bahwa dulu kita tidak merdeka.
Negara kita, politik diereh oleh Belanda, ekonomi
kita diereh, sosial kita diereh; diereh jaitu dipe-
ntah, dikuasai. Kita dulu itu laksana terikat, tangan
kita terikat, kaki kita terikat, kita tidak bisa ber-

buat apa², kita tidak bebas, kita tidak merdeka. Oleh
karena itu kita lantas mengadakan satu gerakan
untuk melepaskan semua tali² ini, melepaskan semua
ikatan² ini agar supaja kita merdeka.

Ikatan² itu apa, Saudara-saudara? Dulu kita diikat
dengan apa? tjoba pikirkan dengan tenang. Dulu kita
ini tidak merdeka, dus kita dulu itu terikat, tidak
merdeka adalah terikat. Kita dulu itu terikat oleh
apa, dengan apa? Pikirkan, aku pernah berkata, ikat-
an itu matjam², ada ikatan militer, ada ikatan politik,
ada ikatan sosial, ada ikatan kebudayaan, ada ikatan
ekonomi, tetapi semua adalah ikatan. Dan ikatan²
ini harus kita petjahkan, agar supaja kita merdeka,
merdeka militer, merdeka politik, merdeka sosial,
merdeka ekonomi, merdeka kebudayaan.

Maka oleh karena itu aku memberi salah satu
djimat kepadamu, hai Rakjat Indonesia, jang ber-
nama Trisakti : Berdaulat penuh, politik, politik ber-
daulat penuh; ekonomis berdikari, berdiri diatas kaki
sendiri, djangan terikat, djangan tergantung, djangan
gumantung kepada siapapun; ketiga, didalam hal
kebudajaan kita harus berkepribadian sendiri. Itu
sebabnja, Saudara-saudara, maka arti Trisakti Tavip,
Trisakti Bung Karno, adalah amat penting sekali
buat Revolusi kita ini, oleh karena Trisakti ini adalah
sebenarnja inti daripada tudjuan Revolusi Indonesia.

Nah, dengarkan, kita dulu diikat, matjam² ikatan,
kataku, militer, politik, ekonomi, sosial, kulturil.
Ikatan² itu ada jang terang-terangan, bisa dilihat de-
ngan mata, ada ikatan jang tidak terang-terangan,
tidak bisa dilihat dengan mata. Ikatan jang terang-
terangan bisa dilihat dengan mata, saja selalu nama-
kan ikatan riil. Riil artinja bisa diraba, bisa dilihat,
bisa dipandang dengan mata, bisa ditjium dengan
hidung, bisa didengar dengan telinga. Itu riil, kita
diikat dengan ikatan² riil. Tetapi disamping itu kita-
pun diikat dengan ikatan² abstrak. Apa, Saudara²
tani, artinja perkataan abstrak? Abstrak artinja gaib.
Gaib apa artinja? Gaib artinja tidak bisa dilihat,
tidak bisa diraba, tidak bisa ditjium dengan hidung
kita, itu artinja gaib, artinja abstrak. Ikatan ini dua
matjam, ada ikatan riil jang tampak njata, ikatan
abstrak atau gaib jang tidak bisa kita lihat.

Ikatan riil apa? Ikatan riil ialah misalnja, kita
dikuasai dengan tentara-tentara Belanda, tentara
Knil; kita dikuasai dengan bom-bom bisa kita lihat;
kita dikuasai dengan pendjara-pendjara bisa kita
lihat; kita dikuasai dengan kapaludara-kapaludara
bisa kita lihat; kita dikuasai dengan kapalselam²
bisa kita lihat; kita dikuasai dengan dinamit² bisa
kita lihat; ini adalah semuanja ikatan² riil. Ada lagi
ikatan jang abstrak, kataku, gaib, tidak bisa kita
lihat, tidak bisa kita raba, apa itu? Misalnja, sebagai
kukatakan berulang-ulang, ikatan jang membuat kita
bentji satu-sama-lain antara kita dengan kita, politik
memetjah-belah, kita dipetjah-belah, orang Djawa
dibuat bentji sama orang Sumatra, orang Sumatra
dibuat bentji kepada orang Kalimantan, orang Kali-
mantan dibuat bentji sama orang Madura, orang
Madura dibuat bentji sama orang Bugis, orang



Dalam rangka menjambut dan turut memeriahkan Mubes Tani di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Bugis dibuat bentji sama orang Ambon, orang Ambon dibuat bentji kepada orang Irian; ini adalah salah-satu ikatan jang tidak bisa diraba, tidak bisa kita lihat, ikatan abstrak, ikatan gaib.

Begitu pula kataku didalam salah satu pidato, ikatan jang dinamakan rasa ketjil, — bahasa asingnja inferiority-complex, minderwaardigheids-complex —, merasa ketjil, merasa kita tidak mampu apa²; jang mampu itu kan kulit putih, jang mampu itu adalah Belanda, jang mampu itu adalah jang sekarang ini memerintah, jaitu pihak Belanda. Kita ditjekoki dengan rasa jang demikian ini, ditjekoki, hai orang Indonesia, engkau, lu Indonesia, engkau tidak bisa berbuat apa², engkau selalu harus kami pimpin, engkau tidak bisa berbuat apa², sehingga achirnja kita mendapat rasa jang demikian itu. Ja betul, betul, betul, kita orang Indonesia tidak bisa berbuat apa² jang bisa berbuat apa² hanjalah orang kulit putih sadja. Ini semuanya, Saudara-saudara, adalah ikatan².

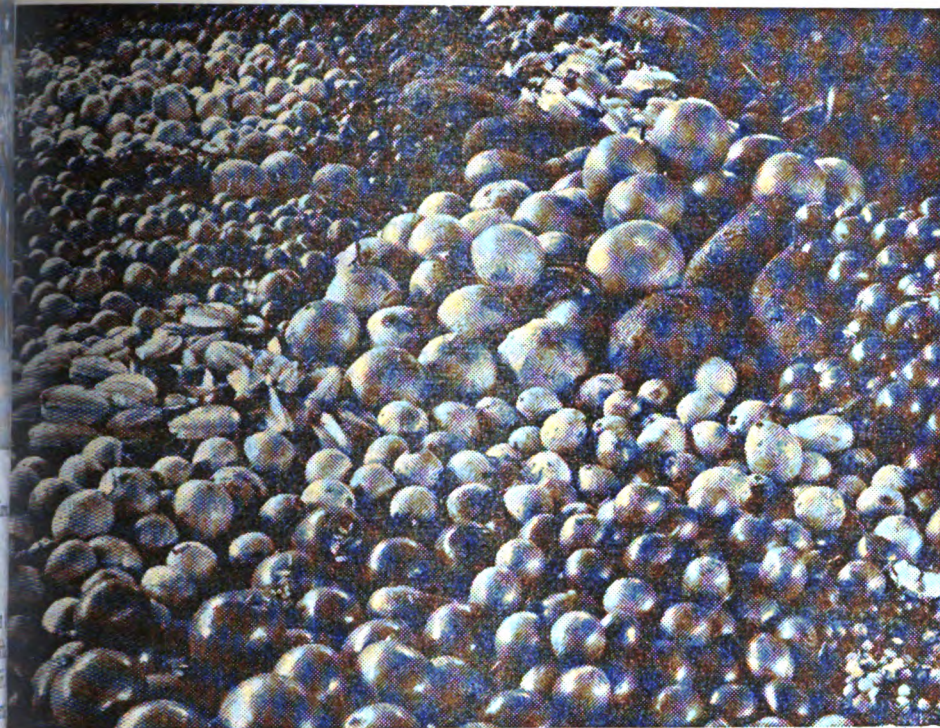
Nah, itu semuanya harus kita petjahkan, djikalau memang benar² kita ingin mentjapai Trisakti, djikalau memang benar² kita ingin memenuhi Amanat Penderitaan Rakjat, djikalau benar² kita ingin mendjalankan trikerangka daripada Revolusi. Kita harus petjahkan semua ikatan² ini, baik ikatan riil, maupun ikatan jang tidak bisa dilihat, jaitu jang abstrak dan gaib.

Salah satu ikatan lagi ialah ikatan ekonomi, Saudara-saudara. Ikatan Ekonomi, kita dibuat tergantung pada negeri Belanda atau pada dunia Barat setjara ekonomis, seluruh ekonomi kita dikuasai oleh mereka, sampai kepada makanan kita sehari-hari, Saudara-saudara, kita harus dapat dari mereka, kita punjai sandang, kita dapat dari mereka. Dua minggu jang lalu aku berpidato di Bogor, aku katakan di Bogor itu, bahwa dulu di abad 18, abad 18 masih, wah apalagi, Saudara-saudara, abad ke 10, abad 11, abad ke 12, abad ke 13, abad ke 15, 16, 17, abad 18 masih, kita itu masih selfsupporting, selfsufficient hal sandang. Apa arti selfsupporting, apa artinja selfsuffi-

cient? Kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, kita tanam kita punia kapas sendiri, kita tenun kita punia tekstil. jaitu bahan pakaian sendiri, tidak perlu kita impor dari negara luar. Tapi imperialisme membuat kita tergantung daripada mereka, kita punia kegunaan untuk membuat pakaian sendiri dimatikan oleh mereka. diganti oleh mereka itu dengan impor tekstil dari luar, impor tekstil dari negeri Belanda sehingga achirnja kita, Saudara-saudara, telandian kalau kita tidak memakai pakaian buatan pabrik negeri Belanda.

Nah, ini semuanya harus kita petjahkan sama sekali. Disinilah, Saudara-saudara, rol jang penting daripada kaum tani, sebagai dikatakan oleh Pa Leimena tadi itu, dilanangan sandang, dilapanan pangan, kaum tani adalah decisive. Decisive artinya dia jang menentukan, bukan pihak lain, Saudara-saudara. Dengan terus terang sadja, kalau mengenai terutama sekali pangan, sokoguru jang nomor duanya kaum buruh itu, ja nomor dua; nomor satu ialah kaum tani, jang bisa memberi kita pangan. Mana ada manusia bisa hidup tanpa pangan? Kita bisa hidup tanpa otomobil, kita bisa hidup tanpa lampu. Kita bisa hidup tanpa sepatu, kita bisa hidup tanpa daya, kita bisa hidup tanpa tielana, kita bisa hidup tanpa barang-barang jang lain-lain, tetapi bisakah enek hidup tanpa pangan, bisakah engkau hidup tanpa makan? Manusia harus makan, sebagaimana dijanjikan manusia — sebagai dikatakan oleh Dr. Sun Yat Sen almarhum — membutuhkan udara ini. Kalau tidak ada udara, manusia mati, ia tidak bisa ambegana, tidak bisa menghirup udara, ia mati. Demikian manusia kalau tidak ada pangan mati: Manusia tanpa pangan itu asalnja dari mana, Saudara-saudara. Usaha kaum tani Oleh karena itu aku katakan kepada kaum tani adalah pula sokoguru daripada Revolusi Indonesia, jang bertudjuan untuk mengadakan tjukup sandang tjukup pangan buat Rakyat Indonesia ini seluruhnja dari Sabang sampai Merau

Bersambung ke halm. 12 dan



Tampaknja Aneka ragam buah-buahan tetapi ini baru sebagian ketjil dari sekian banjak buah-buahan jang dihasilkan oleh kaum Tani, Sokoguru utama Revolusi Indonesia.

Teratai



Ekspor banjak, negarapun kuat mari perbanjak produksi Tjoklat.

Lima Azimat

Adalah Inti Perdjjuangan Kita

Pada pelantikan anggauta-anggauta Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Hari Kamis tanggal 22 Djuli 1965 bertempat diistana Negara, Presiden Sukarno menekankan agar Lembaga tersebut dapat menuangkan LIMA AZIMAT REVOLUSI Indonesia kedalam rentjana hukum jang sedang dibina dan mendjebol serta membuang djauh-djauh hukum kolonial.

Didjelaskan pula oleh Presiden bahwa hukum Nasional kita adalah untuk mendjaga dan menjelamatkan orde kita dan menghantam orde jang hendak menghanturkan atau mengganggu orde kita. Oleh karena itu kita harus membina hukum jang berpegang teguh kepada Lima Azimat Revolusi Indonesia. Lima Azimat itu adalah inti perdjjuangan kita dan kalau diperas berisi pengertian BERDIKARI. Demikian Presiden Sukarno. Selandjutnja diuraikan bahwa Lima Azimat Revolusi Indonesia itu adalah PANTJASILA, MANIPOL-USDEK, NASAKOM, TRI-SAKTI dan BERDIKARI, dan kelima Azimat ini adalah jang paling utama dan memberi isi serta inti perdjjuangan kita. Kelima Azimat inilah jang benar-benar mendjiwai hukum Nasional kita. Dalam membina hukum Nasional, kita harus mendjebol hukum-hukum kolonial dan liberal jang berfungsi menjelamatkan dan mendjaga kepentingan kolonialis, imperialis dan feodalis, dan jang menindas serta menghanturkan kekuatan-kekuatan dan usaha-usaha jang mau mendjebol old orde.

Selandjutnja Presiden menegaskan lagi merecapnja pengertian NASAKOM, maka utjapan

NASAKOM DJIWAKU

Sambungan hal. 10.

Saja ulangi, kita harus petjahkan sama sekali ikatan² ini. Ikatan militer sudah kita petjahkan, ikatan politik sedang kita petjahkan, ikatan — itu tadi — pemetjah-belahan, sedang kita petjahkan. Kita mengadakan politik Nasakom, kita mengadakan politik persatuan Indonesia dan kesatuan Indonesia. Malahan, tadi kalau saja mendengar Pak Djasmin, Pak Sudjasmin, saja mendengar lagu Nasakom itu, barangkali ada lebih baik kita koreksi sedikit, bukan hanja „Na-sa-kom bersatu”, barangkali lebih baik

„Nasakom Bersatu” harus diganti dengan NASAKOM DJIWAKU.

Ditambahkan bahwa revolusi kita adalah membangun hari sekarang dan hari depan dan membuang serta mendjebol jang usang ialah jang liberal, kolonial dan imperialis.

„Kita harus mentjiptakan dan tidak hanja meniru atau mendjiplak sadja” demikian Presiden menegaskan bahwa kita harus berpidjak pada bumi jang sekarang dengan pokok dari segala pokok ialah BERDIKARI.

Achirnja Presiden menegaskan : „Saja mengharapkan karya-karya orang-orang jang berdjaja dan dari para sardjana-sardjana jang duduk dalam Lembaga Pembinaan Hukum Nasional ini. Saja harap agar tidak hanja mendjadi perpustakaan jang penuh dengan buku-buku tetapi mendjadi orang jang mempunjai dua tangan jang dapat mendjebol dan membina”. Demikian Presiden Sukarno mensitir kata-kata Rabindranath Tagore.

Presiden mendjelaskan pula bahwa tugas revolusi dalam tahap I adalah mendirikan negara jang merdeka penuh dan demokratis, jang merupakan sendjata dalam tangan rakjat Indonesia, sebagai halnya dengan Negara Republik Indonesia adalah alat untuk memenangkan Revolusi serta mengamankan dasar dan tudjuan Revolusi. Selandjutnja dalam tahap II pembinaan hukum pe- data, tatanegara, administrasi, ekonomi, laut, dan darat dan lain-lain. (ANTARA).

kita bilang „Na-sa-kom djiwaku”. Haa. (Didjelaskan oleh hadirin : Betul, betul — Red.). Na-sa-kom djiwaku, hahaa, lebih hakkul jakin masuk berserjam didalam kitapunja dada, bukan tjuma berserjam tetapi djiwaku adalah djiwa Nasakom. Tadi Pak Leimena mengatakan tentang Musjawarah Besar Tani ini, Saudara-saudara, pidato berkobar-kobar waktu saja minta beliau menjanji, jaah sedikit „njeleweng-njeleweng”, lagu „Ajo Mama” itu ta- bagaimana lagu „Ajo Mama”, Pak Leimena? (Pak Leimena tampil kedepan dan menjanji — Red.)

Bersambung ke hal.

GUDANG²/RUANGAN JANG PERLU DAN JANG TIDAK PERLU DIDAFTARKAN

Untuk mentjegah adanja tafsiran jang berbedabeda mengenai pendaftaran pergudangan berhubung dengan telah dikeluarkannja Undang-Undang No. 11 Tahun 1965, maka perlu diberi pendjelasan-pendjelasan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1965 adalah penetapan Perpu No. 5 Tahun 1962 tentang Pergudangan Mendjadi Undang-Undang.
2. Gudang/Ruangan jang telah didaftarkan berdasarkan Perpu No. 5 Tahun 1962 tersebut jo. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 261/M/SK/1963 dan No. 501/M/SK/1963 dan Pengumuman Kepala Direktorat Perdagangan Dalam Negeri No. 1018/H.-III-O/DPDN tgl. 25 Djuni 1963 **tidak perlu didaftarkan lagi.**
3. Gudang-gudang/Ruangan jang didirikan setelah keluarnja Undang-Undang No. 11 Tahun 1965 tanggal 14 Djuni 1965 tersebut, diatas, harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri dan peraturan pelaksana tersebut pada ajat 2 diatas. Pendaftaran dilakukan pada : a) Kantor Perdagangan Dalam Negeri/Tjabang Inspeksi Perdagangan Dalam Negeri (KPDN./TIPDN.) setempat b) untuk Djakarta Raya pada Perwakilan Departemen Perdagangan Dalam Negeri dan Urusan Perdagangan Luar Negeri (IPDN. Djakarta Raya jang lama) dan c) untuk Daerah Istimewa Jogjakarta pada Dinas Perekonomian Daerah Istimewa Jogjakarta Bagian Perdagangan Dalam Negeri.

4. Kewadajiban-kewadajiban dari pemilik/pengusaha gudang/ruangan baik bagi mereka jang tersebut pada ajat 2 maupun ajat 3 diatas, sebagaimana berlaku sampai sekarang ini adalah hanja sebagai berikut :
 - a. mengadakan administrasi mengenai barang-barang jang masuk dan keluar gudang, sehingga djelas dapat diketahui asal dan harga pembelian barang maupun tudjuan dan harga pendjualannja dengan maksud untuk agar lalu lintas barang-barang tersebut mudah diikuti.
 - b. memberi segala keterangan mengenai persediaan dan mutasi barang-barang perniagaan jang diminta oleh Menteri Perdagangan.
 - c. membayar uang biaja administrasi per tiap-tahun, jang djumlah dan tjara pembayarannja ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
5. Gudang-gudang/Ruangan jang terletak dipelabuhan jang termasuk dalam kekuasaan/pengawasan Penguasa Pelabuhan **dibebaskan** dari peraturan pergudangan ini.

Untuk keterangan lebih landjut mengenai pelaksanaan dari Undang-Undang tentang Pergudangan, dapat diminta pada Direktorat Pengadaan dan Penjaluran di Pusat, pada Perwakilan Departemen Perdagangan didaerah Daswati I jang bersangkutan dan pada Kantor Perdagangan Dalam Negeri/Tjabang Inspeksi Perdagangan Dalam Negeri (KPDN./TIPDN.) setempat.

Sambungan hal. 12

NASAKOM DJIWAKU

Kalau Tuan memotong manggis, djanganlah makan ditengah sawah; nekolim duduk menangis, melihat tani Indonesia musjawarah").

Ja, lha tadi kenapa kok gemetar? (Presiden lalu menjanji, disambung dengan refreinnja — Red.).

Kalau Tuan memakan manggis, djangan dimakan ditengah sawah; nekolim semua menangis, kaum tani permusjawarah").

Nah Saudara-saudara, hai kaum tani Indonesia, itulah sebabnja aku sangat bergembira diadakan Mubes Tani. Segala potensi daripada kaum tani, sokoguru daripada Revolusi dipersatu-padukan untuk menyelesaikan Revolusi Indonesia ini jang menang belum selesai. Dengan Mubes Tani ini kita bisa menggembleng sokoguru tani mendjadi sokoguru jang terbuat dari besi dan badja, jang kaum nekolim tidak akan bisa menggerogotinja, sehingga kaum nekolim tidak akan bisa menggugurkan Revolusi

Indonesia ini. Bekerdjalah sekuat-kuatnja.

Hai Mubes Tani, benar² tjapailah dengan Mubesmu ini apa jang kau djandjikan kepadaku didalam pidato pembukaan oleh Pak Bambang Murtijoso tadi. Saja berkata, bahwa pokok daripada segala pokok, bukan sadja, bukan sadja kesadaran tani, Saudara-saudara, sebagai sokoguru daripada Revolusi ini; tetapi djuga kesadaran jang sampai meningkat kepada hakkul yakin, bahwa Revolusi Indonesia ini hanjalah bisa selesai kalau bangsa Indonesia ini bersatupadu, bahwa Nasakom bukan sadja kita lihat sebagai satu phenomeen bersatu, tetapi saja minta kepada seluruh kaum tani, seluruh kaum buruh, seluruh sukarelawan, seluruh Angkatan Bersendjata, supaja berkata, **Nasakom djiwaku, Nasakom djiwaku, Nasakom djiwaku!**

Hanja djikalau demikianlah, Saudara-saudara, kita benar² bisa melandjutkan Revolusi ini sehingga tertjapai segala apa jang diamanatkan oleh Rakjat kepada kita jang hidup sekarang ini.

Sekian, Saudara-saudara, terima kasih.

„Peraturan Pergudangan 1962”

UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1965

TENTANG

**PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1962
TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No. 2 Prp TAHUN 1960 TENTANG PERGUDANGAN
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 No. 31) MENDJADI UNDANG-UNDANG.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden untuk memperkuat Front Ekonomi 1962 No. Instr. 2/Ko. T.O.E. tahun 1962 perlu segera mengadakan perubahan atas Peraturan Pergudangan 1960 sebagaimana yang dimuat dalam Undang-undang No. 2 Prp tahun 1960;
- b. bahwa karena keadaan mendesak Pemerintah berdasarkan pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar telah mengatur hal tersebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- c. bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 2 Undang-undang Dasar, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu ditetapkan menjadi Undang-undang.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat 1, 20 dan 22 Undang-undang Dasar;
 2. Amanat Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi tentang garis² besar pimpinan ekonomi nasional tanggal 18 Mei 1962;
 3. Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi untuk memperkuat Front Ekonomi 1962 No Instr. 2/Ko. T.O.E. Tahun 1962;
 4. Undang-undang tentang Pergudangan No. 2 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 14);
- Dengan persetujuan :** Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No. 2 Prp. TAHUN 1960 TENTANG PERGUDANGAN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 No. 31), MENDJADI UNDANG-UNDANG sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai dibawah ini :

Pasal 1.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- a. „Gudang”, ialah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tudjuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penjinpanan barang² perniagaan, dan memenuhi syarat² lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan;
- b. „barang perniagaan”, ialah barang bergerak yang pemakaiannya tidak diperuntukkan pemiliknya sendiri.

Pasal 2.

Semua pihak yang menjadi pemilik dan/atau penguasa gudang diwajibkan :

- a. mendaftarkan gudangnya menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan;
- b. mengadakan administrasi mengenai barang² yang masuk dan keluar gudang, sehingga jelas dapat diketahui asal dan harga pembelian barang maupun tudjuan dan harga penjualannya dengan maksud untuk memudahkan lalu-lintas barang² tersebut;
- c. memberi segala keterangan mengenai persediaan dan mutasi barang² perniagaan yang diminta oleh Menteri Perdagangan dan/atau instansi² Pemerintah yang berwenang dalam hal ini;
- d. membayar uang biaya administrasi tiap tahun yang djumlahnya dan tjara pembayarannya ditetapkan oleh Menteri Perdagangan;
- e. kewajiban² tersebut pada ayat² a sampai dengan d diatas diketjualikan bagi gudang² yang terletak dipelabuhan yang termasuk dalam kekuasaan/pengawasan Penguasa Pelabuhan.

Pasal 3.

- (1) Siapapun dilarang menjimpan barang² penting dalam gudang lebih lama dari pada djangka waktu jang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
- (2) Djenis² barang² penting termaksud pada ayat (1) pasal ini akan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
- (3) Djangka waktu termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan mengingat :
 - a) barang hasil dari impor guna penjalurannya didalam negeri;
 - b) barang hasil dalam negeri dengan tudjuan ekspor;
 - c) penggolongan gudang menurut letak tempatnja.
- (4) Menteri Perdagangan dapat mengadakan pembatasan² terhadap pemindah-tanganan barang² penting;
- (5) Dalam melaksanakan ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini Menteri Perdagangan mendengar Menteri² jang berkepentingan.

Pasal 4.

- (1) Menteri Perdagangan mengatur lebih lanjut pelaksanaan dari ketentuan² dalam Undang-undang ini.
- (2) Instansi Pemerintah lain dilarang membuat peraturan tanpa kuasa Menteri Perdagangan.

Pasal 5.

Pelanggaran terhadap ketentuan² dalam atau berdasarkan Undang-undang ini adalah tindak pidana ekonomi.

Pasal 6.

Undang-undang ini dinamakan „Peraturan Pergudangan 1962”, dan mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya dengan mempunyai daja surut sampai tanggal 30 Djuni 1962.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 14 Djuni 1965.
SEKRETARIS NEGARA,

ttd.

MOHD. ICHSAN.

Disahkan di : D j a k a r t a.
Pada tanggal : 14 Djuni 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 No. 54.

P E N D J E L A S A N

ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1965

TENTANG

NETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1962
ENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No. 2 Prp. TAHUN 1960 TENTANG PERGUDANG-
AN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 No. 31) MENDJADI UNDANG-UNDANG.

PENDJELASAN UMUM :

Dengan didjiwai oleh Instruksi Presiden No. Instr. 2/Ko. T.O.E. tahun 1962 jang dikeluarkan atas landasan amanat Presiden tentang garis² besar ekonomi nasional tahun 1962 mendjelang pembebasan Irian Barat, maka terhadap Peraturan Perdagangan 1960 perlu diadakan perobahan untuk khusus memperlantjar lalu-lintas barang perniagaan, terutama barang penting dengan membatasi waktu penjimpanannya dalam gudang²;

Pembatasan waktu penjimpanan itu sangat perlu untuk mempertjepat djalannya arus barang, jaitu :

- barang dengan tudjuan ekspor supaja lantjar mengalir dari gudang didaerah pedalaman ke gudang didaerah tengah dan selekasnja masuk ke-gudang pelabuhan, siap untuk diekspor.
- barang asal impor supaja lantjar mengalir dari gudang pelabuhan ke-gudang didaerah tengah dan selekasnja diteruskan ke-gudang-gudang didaerah pedalaman.

— terutama supaja dalam gudang² didaerah tengah tidak penuh tertumpuk barang² untuk diekspor maupun barang² asal impor.

- c. Pemindah-tanganan barang digudang djuga perlu dibatasi, sehingga jang untuk ekspor lekas diekspor dan jang asal impor lekas dialokasikan.
- d. Pembatasan waktu penjinpanan maupun pembatasan pemindah-tanganan barang digudang, terutama didaerah tengah, adalah usaha mendorong serta memelihara djalannja arus barang setjara terus-meneru menuju tempat pada waktu jang setjepat-tjepat
- e. Memiliki/menguasai gudang seperti memikul tugas kepentingan umum dan diikuti-sertakan dalam pemberantasan gangguan² lalu-lintas barang, oleh sebab itu pelanggaran² atas ketentuan² dalam Peraturan Pergudangan ini diantjam dengan hukuman berat dengan djalan menjatakannja sebagai tindak-pidana ekonomi.

Sudah barang tentu pelaksanaan Peraturan ini harus diamankan dengan perbaikan hal² dibidang lain seperti transport didarat dan dilaut.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Gudang jang harus didaftarkan itu ialah ruangan jang dipergunakan untuk menjimpan barang² perniagaan dan jang tidak diperuntukkan penjinpanan barang untuk keperluan sendiri, sehingga sebuah ruangan dalam rumah jang memenuhi sjarat² jang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan sebagai gudang, tetapi hanya dipergunakan untuk menjimpan barang² kebutuhan rumah-tangga sendiri bukan barang² perusahaan bukanlah gudang menurut undang² ini, karena itu tidak perlu didaftarkan.

Pasal 2.

Pemlik dan/atau penguasa gudang diwadjabkan :

- mendaftarkan gudangnja menurut peraturan jang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan;
- mengadakan administrasi jang teratur dan tjukup djelas dari keluar masuknja barang² digudangnja sehingga dapat diketahui asal dan harga pembelian serta tudjuan dan harga pendjualan barang², agar dapat mudal diikuti djalannja peredaran barang² tersebut;
- memberi segala keterangan mengenai persediaan dan mutasi barang² perniagaan jang diminta oleh Menteri Perdagangan dan/atau instansi² Pemerintah jang berwenang dalam hal ini.
- ketentuan² tersebut diatas tidak dikenakan/berlaku bagi lumbung² Desa jang biasa digunakan untuk menjimpan padi.

Pasal 3.

- (1) Ketentuan ini dimaksudkan agar barang² penting itu tidak terlalu lama disimpan didalam gudang;
- (2) Dalam peraturan ini tidak disebutkan satu-persatu barang² penting itu, tetapi hanya memberikan wewenang kepada Menteri Perdagangan untuk menetapkan sesuatu barang itu sebagai barang penting. Ketentuan demikian diperlukan agar dapat dengan mudah menjesuaikannja dengan waktu dan keadaan.
- (3) Tjukup djelas.
- (4) Ketetapan ini memberikan wewenang pada Menteri Perdagangan untuk mentjegah perdagangan l rantai dari barang² tersebut pada ajat 2.
- (5) Tjukup djelas.

Pasal 4.

- (1) Ketentuan ini memberikan wewenang pada Menteri Perdagangan untuk menetapkan peraturan pelaksanaan dan peraturan khusus untuk menjempurnakan peraturan ini.
- (2) Untuk mendapatkan koordinasi jang sebaik-baiknya dan mentjegah peraturan jang bersimpang-si maka instansi Pemerintah lainnja dilarang membikin peraturan dibidang pergudangan ini, tanpa mendapat kuasa dari Menteri Perdagangan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 2759.

Masalah Pengintegrasian Bank - Bank Pemerintah

I. Dalam rangka perombakan yang radikal terhadap struktur perbankan di Indonesia menuju ke arah sistem dan struktur perbankan yang bersifat tunggal, maka telah dikeluarkan suatu Penetapan Presiden No. 8 tahun 1965, yang menetapkan bahwa Bank-Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara akan mengalami reorganisasi dan akan ditijptakannya suatu struktur perbankan yang tunggal, demikian diuraikan oleh Menteri Urusan Bank Sentral, Jusuf Muda Dalam, dalam pelantikan Direktur Bank Indonesia Oei Beng To, dan pelantikan Pelopor Bank Persepsi, pada hari Senin tanggal 27 Djuli 1965.

Struktur perbankan yang bersifat tunggal ini adalah sebagai suatu akibat dari keharusan adanya keterarahan dalam bidang perbankan, sehingga oleh karenanya diperlukan satu komando yang berada dalam tangan Menteri Urusan Bank Sentral.

Tingkatan perkembangan Revolusi Indonesia sekarang ini memerlukan agar Bank-Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara diintegrasikan ke dalam Bank Sentral untuk dapat terlaksananya kebijaksanaan Pemerintah dibidang moneter dan perbankan setjara efektif, efisien dan terpadu. Ini adalah syarat mutlak bagi pelaksanaan Program Ekonomi Perjuangan sebagaimana diarahkan oleh Presiden/Mandataris M.P.R.S. dalam amanat Politiknja di depan sidang umum M.P.R.S. pada tanggal 11 April 1965.

Azaz ekonomi terpadu berarti bahwa bidang keuangan-pun haruslah diatur atas dasar kepemimpinan oleh rentjana² yang penguasaannya serta pengolahannya berada pada Presiden Pemimpin Besar Revolusi, yang merupakan kesatuan pimpinan politik dan pimpinan ekonomi. Perbankan oleh karenanya, sebagai salah satu bagian dari bidang keuangan haruslah menyesuaikan operasinya dan sebagai akibat dari padanja djuga organisasinya agar dapat melaksanakan azaz-azaz keuangan berentjana itu tadi.

Berdasarkan azaz² tersebut diataslah maka untuk menudju terwujudnya struktur dan organisasi perbankan yang bersifat tunggal, dikeluarkan Penpres No. 8 dimana dinjatakan bahwa Bank-Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara diintegrasikan kedalam Bank Sentral.

Ditetapkan pula dalam Penpres tersebut, bahwa pengintegrasian dari Bank-Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara kedalam Bank Sentral dilakukan dengan Penetapan Presiden yang memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Menteri Urusan Bank Sentral.



*J.M. Menteri Urusan Bank Sentral
JUSUF MUDA DALAM*

II. Oleh P.J.M. Presiden telah ditanda-tangani Penetapan No. 9, No. 10, No. 11, dan No. 13 tahun 1965 dimana dinjatakan berturut-turut bahwa Bank Koperasi, Tani dan Nelajan, Bank Umum Negara, Bank Tabungan Negara dan Bank Negara Indonesia diintegrasikan kedalam Bank Sentral.

Ini adalah langkah² pertama menudju pembentukan suatu Bank Tunggal guna menjederhankan struktur perbankan di Indonesia. Dengan demikian perbankan lebih dapat dimanfaatkan sebagai salah satu aparat dalam melaksanakan sistem Ekonomi dan Keuangan yang terpadu dan terarah. Adanja struktur perbankan yang tunggal dapatlah lebih mudah dilakukan penjaluran, pengawasan dan penggunaan dana² setjara efisien dan efektif. Djuga penjebaran-penjebaran tenaga-tenaga ahli perbankan untuk memperluas jaringan perbankan, guna pengaturan sistem pembalajaran dan lalu-lintas uang yang lebih terpadu.

dan terorganisasikan. Kesatuan Komando yang dipegang oleh Menteri Urusan Bank Sentralpun menjadi lebih tegas. Pada peringatan Hari Bank tahun 1963, juga hal ini telah diamanatkan oleh Presiden dimana ditegaskan oleh beliau keharusan ada satu Komando dibidang perbankan, komando mana berada dalam tangan Menteri Urusan Bank Sentral.

Tadi telah disebutkan, bahwa penandatanganan Penpers No. 9, 10, 11 dan 13 tersebut adalah langkah² pertama menuju pembentukan suatu Bank Tunggal ini yang konsepnya telah disetujui oleh Presiden dalam waktu yang tidak lama lagi akan ditandatangani oleh beliau sehingga Bank Tunggal ini nantinya adalah merupakan satu²nja wadah, pada saat dilaksanakannya setjara² efektif pengintegrasian Bank-Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara kedalam Bank Indonesia sebagaimana termaktub dalam Penpres No. 8 tahun 1965 juncto Penpres No. 9, No. 10, No. 11 dan No. 13 tahun 1965. Saat dilaksanakannya setjara² efektif pengintegrasian ini yang djatuhnja bersamaan dengan saat berdirinja Bank Tunggal adalah tanggal 17 Agustus 1965 yang akan datang.

Sebagai alat Revolusi ia melakukan usaha² untuk menjelenggarakan dan mendorong kegiatan² dibidang ekonomi dan keuangan dengan kebijaksanaan² yang digariskan oleh Pemimpin Besar Revolusi dan Pemerintah.

III. Bank Tunggal ini nanti akan merupakan satu²nja Bank Negara yang menjalankan tugas setjara aktif sebagai alat Revolusi dan abdi Amanat Penderitaan Rakyat menjelesaikan tudjuan² Revolusi Indonesia.

Sebagai alat Revolusi dan Abdi Ampera yang didijwai oleh Dekon dan Doktrin² Revolusi Indonesia lainnja Bank Tunggal ini aktif dalam segala tingkat Perdjjuangan Revolusi guna membangun masyarakat Sosialisme Indonesia berdasarkan Pantjasila.

Sebagai alat Revolusi ia melakukan usaha² untuk menjelenggarakan dan mendorong kegiatan² dibidang ekonomi dan keuangan sesuai dengan kebijaksanaan² yang digariskan oleh Pemimpin Besar Revolusi dan Pemerintah.

Bank Tunggal inipun akan menggalang kerdjasama dibidang ekonomi moneter dengan NEFO menuju terwujudnja Dunia Baru yang bebas dari penghisapan oleh Bangsa atas Bangsa dan penghisapan manusia oleh manusia.

Bank Tunggal ini juga harus membangkitkan dan memupuk daya tjipta dan swadaya Karyawan²nja untuk melaksanakan Amanat Berdikari menuju terwujudnja Tri Sakti Tawar. Ia harus dapat mengantarkan djasa²nja dengan segala tjara dan daya sampai ke pelosok² untuk mengintegrasikan diri dengan masyarakat dan ikut aktif mengembangkan potensi Rakyat.

Apa yang diuraikan diatas adalah tudjuan² sutji dari Bank Tunggal ini, mission sacrenja Bank Tunggal ini, yang tentunja akan berbeda sekali

dengan tudjuan² dan tugas² bank yang terdapat diluar negeri, seperti Bank Of England umpamanya.

Ini adalah benar² merupakan "Umgesaltung Vom Grund Aus" dari struktur perbankan di Indonesia, karena perbankan juga harus bergerak seiring dengan jalannya Revolusi. Perbankan harus juga memiliki sifat „pelopor" dalam mengedjar tudjuan Revolusi kita. Pendek kata Bank Tunggal ini haruslah benar² merupakan pantjaran dari pada Doktrin Revolusi Indonesia.

Pada tanggal 17 Agustus 1965 nanti, yakni pada saat pengintegrasian Bank² Umum Negara dan Bank Tabungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Penpres² yang disebut diatas tadi, maka pendirian Bank Tunggal sebagai satu²nja Bank Negara dengan tugas² yang diuraikan diatas haruslah sudah pula dilaksanakan, yang kini sudah disetujui oleh Presiden.

IV. Bank Tunggal ini dimana nantinya Bank Indonesia, bekas B.K.T.N., Bank Umum Negara Bank Tabungan Negara dan Bank Negara Indonesia dileburkan kedalamnja oleh Presiden dengan nama „BANK NEGARA INDONESIA".

Nama ini dipilih oleh Presiden atas dasar kejajanaan sedjarah Revolusi Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan dari Bank Negara Indonesia sebagai Bank yang dilahirkan dalam Revolusi Indonesia tidak pernah lepas dari sedjarah perdjjuangan Revolusi Indonesia. Ia tetap didijwai oleh doktrin² Revolusi dalam perdjjuangannya menggalang barisan kekuatan ekonomi nasional kita.

Dari uraian saja diatas djelaslah bahwa pengintegrasian setjara efektif dari Bank Indonesia Bank-Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara ke-Bank Tunggal yang akan dinamakan nanti „Bank Negara Indonesia" akan berdjala pada Petprea mengenai pendirian Bank Tunggal, yang konsepnya oleh Presiden telah disetujui, ditandatangani dan diundangkan.

Oleh team² pembantu saja segala persiapan kearah itu dalam waktu yang se-singkat²nja akan diselesaikan karena tidak lama lagi Penpres yang bersangkutan akan ditandatangani.

V. Perlu didjelaskan disini, bahwa tidak seorang karyawanpun dirugikan dalam perombakan struktur perbankan ini. Bahkan untuk setiap karyawan semakin banyak terbuka kemungkinan² untuk mengembangkan bakat dan ketjapannya, berhubungan dengan lebih luasnja scope yang diliputi oleh Bank Berdjjuang yang Tunggal ini. Djustru dalam perombakan struktur perbankan ini perlu pula dibangun watak, mental karyawan agar supaya tetap dalam kondisi yang memuaskan sjarat² sebagai alat Revolusi dan abdi Ampera.

Bersambung ke hal.

PENGINTEGRASIAN BANK-BANK PEMERINTAH Kedalam

BANK TUNGGAL Dengan Nama :

„Bank Negara Indonesia”

Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No. Kep. 65/UBS/65. tgl. 30-7-1965.

MENTERI URUSAN BANK SENTRAL

Menimbang :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Penetapan-Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 8, 9, 10, 11, 13, 16 dan 17 tahun 1965 yang kesemuanya merupakan satu kebulatan daripada proses pembentukan Bank Tunggal milik Negara, perlu menetapkan ketentuan-ketentuan guna menjamin terlaksananya integrasi/peleburan termaksud dalam Penetapan-Penetapan Presiden tersebut diatas dengan setertib-tertibnja;

Mengingat :

Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 1965 (L.N. tahun 1965 No. 45) tentang pengintegrasian Bank-Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara kedalam Bank Sentral;

Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 1965 (L.N. tahun 1965 No. 46) tentang pengintegrasian Bank Koperasi, Tani dan Nelajan kedalam Bank Indonesia, juncto Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No. Kep. 47/UBS/65 tanggal 15 Diuni 1965 tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan pengintegrasian Bank tersebut kedalam Bank Indonesia;

Pasal 1, 2 dan 6 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 10 tahun 1965 (L.N. tahun 1965 No. 56) tentang pengintegrasian Bank Negara kedalam Bank Indonesia;

Pasal 1, 2 dan 6 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 11 tahun 1965 (L.N. tahun 1965 No. 57) tentang pengintegrasian Bank Tabungan Negara kedalam Bank Indonesia;

Pasal 1, 2 dan 6 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 13 tahun 1965 (L.N. tahun 1965 No. 59) tentang pengintegrasian Bank Negara Indonesia kedalam Bank Indonesia;

Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 1965 tentang Ketentuan tambahan perihal pengintegrasian Bank-Bank Umum

dan Bank Tabungan Negara kedalam Bank Sentral;

7. Pasal 5 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965 tentang Pendirian Bank Tunggal milik Negara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama :

Pengintegrasian Bank Negara, Bank Tabungan Negara dan Bank Negara Indonesia kedalam Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Penetapan-Penetapan Presiden No. 10, 11 dan 13 tahun 1965, dan peleburan Bank Indonesia beserta Bank-Bank yang dimaksud dalam Penetapan-Penetapan Presiden No. 9, 10, 11 dan 13 tahun 1965 kedalam Bank Tunggal yang bernama „Bank Negara Indonesia” sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 Penetapan Presiden No. 17 tahun 1965, ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 1965 :

Kedua :

Sampai ada ketentuan lebih lanjut, maka terhitung mulai tanggal 17 Agustus 1965 :

- a. Kantor-Kantor Bank Indonesia mendjalankan usaha-usahanja dengan nama : „Bank Negara Indonesia, Unit I”;
- b. Kantor-Kantor Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelajan mendjalankan usaha-usahanja dengan nama : „Bank Negara Indonesia, Unit II”;
- c. Kantor-Kantor Bank Negara Indonesia mendjalankan usaha-usahanja dengan nama „Bank Negara Indonesia, Unit III”;
- d. Kantor-Kantor Bank Umum Negara mendjalankan usaha-usahanja dengan nama : „Bank Negara Indonesia, Unit IV”;
- e. Kantor-Kantor Bank Tabungan Negara mendjalankan usaha-usahanja dengan nama : „Bank Negara Indonesia, Unit V”;

Bersambung ke halm. 22.

DAFTAR NAMA PERSONALIA SEKRETARIAT UMUM DAN SEKSI-SEKSI

URUSAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

No. urut	Daerah Tingkat I	Kepala SEKRETARIAT UMUM	Kepala Seksi PENGADAAN DAN PENJALURAN	Kepala Seksi H A R G A
1.	A t j e h	Wahab Daud S.H.	Amir	Mustafa
2.	Sumatra Utara	Ali Achbar	Dj. Munthe	S. Siregar
3.	Sumatra Barat	Sajuti Saibi	Abdul Munir Murad	Sabarudin Jaman
4.	R i a u	Kuslizar	Drs J. Gasperz	Djumari Ali **
5.	D j a m b i	Ridwan Ch.	Drs Jahja Musa	Daud Makruf **
6.	Sumatra Selatan	Basjariah Laconi	Achmad Zaini	Zainuri Matjik
7.	Lampung	Sukirman	Ibrahim Drs P. Nainggolan **	Abdul Salam
8.	Djakarta Raya	Soetarno Adinoto	P. Lembong BBA	Endang Sutedja
9.	Djawa Barat	Totong Sondjaja	Didi Marsidi **	Atang Maksum
10.	Djawa Tengah	R. Abdulkadir	Drs Ladrang Lalean	R. Harjono
11.	Djawa Timur	Ibrahim Ratu Purbaja	Radja Nongtjik	Prasman Ali
12.	Kalimantan Selatan	F.R. Adian	Burhanuddin SH.	Abdul Chalik Pa
13.	Kalimantan Timur	Moh. Kusosi	Madjed Efendi	Edy Suhaedi
14.	Kalimantan Tengah	Tius Taladjan	Wahidin Tjarang	Wahidin Tjarang
15.	Kalimantan Barat	Jusnaeni Jusuf	B.E. Pohan B.A. **	Rachman Adiwir
16.	Sulawesi Selatan	Andi Patongaj	Ismu Suwanto **	A. Ch. Sijantra
17.	Sulawesi Tenggara	Suhaemi Achmad	Laode Hamiru.	Laode Hamiru *
18.	Sulawesi Tengah	Andi Sinrang	R. Dogu	R. Dogu *
19.	Sulawesi Utara	B.J. Tendean	H.T. Lantu	N. Sumilat
20.	B a l i	Anak Agung Gde Oka	I Gst. Nhurah	Sawetere
21.	Nusa Tenggara Barat	B. Sugito BA.	Tjahjadi Bondan Setijowidjojo	Handono Warih
22.	Nusa Tenggara Timur	Abd. Rachman Dupa	Suwoso Siswo	Suwoso Siswo *
23.	M a l u k u	F. Sahulata	A.J. Sahusi	J.P. Pulumahuny
24.	Jogjakarta	A. Bardhani	Lawane ** Suharno BBA.	Suharno BBA. *

Kepala Seksi yang dirangkap oleh :

* Kepala Seksi lain/Kepala Sekretariat Umum

** Kepala Bagian Perdagangan Dalam Negeri

*** Kepala Bagian Perdagangan Luar Negeri.

PERWAKILAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN SELURUH DAERAH TINGKAT I

Seksi LOGI	Kepala Seksi EKSPOR	Kepala Seksi IMPOR	Kepala Seksi MARKETING & RESEARCH	Keputusan Menteri Perdagangan DN/ Kuasa M.P.L.N.
Ichsan	Huslin Raden	Bahrumsjah Lubis	Amir *	No 064/MPDN/SK/65
Smartadji	Burhanudin Hasan	Muchtar Abdul Manap	Harun Alrasjid	065/MPDN/SK/65
Sjim	R. Moejadi	Abu Nain	Hasan Basri	066/MPDN/SK/65
	Sjahruddin Datuk Paduko Alam	Drs J. Gasperz *	A. Nazaruddin	067/MPDN/SK/65
etrologi Padang	Drs K.A. Tambunan ***	Drs Jahja Musa *	Hanirin Hutagalung	068/MPDN/SK/65
	Amir Tinggi Simangunsong ***	A. Salimudin Amin	Sabar Togatorok	069/MPDN/SK/65
etrologi Palembang	Rozali St. Basri	Mashud	S. Abdullah	070/MPDN/SK/65
	Drs R. Soejadi ***	Sabar	Walujo	071/MPDN/SK/65
	R. Sujitno	Pahu	Atang Maksum *	072/MPDN/SK/65
	Soewarno ***	Soebarno	R. Abdulkadir	073/MPDN/SK/65
	R. Djokowalujo ***	Prajitno	Baderus Sjamsi	074/MPDN/SK/65
okusumo	A. Madjid ***	Burhanudin SH *	M. Sjahdan	075/MPDN/SK/65
odihardjo	Muljono	Edy Suahedi *	Muljono	076/MPDN/SK/65
etrologi Djarmasin	Widyohadikusumo	—,—	Widyohadikusumo *	
	Moh. Husni ***	G. Morlan Silitonga	Tius Taladjan *	077/MPDN/SK/65
Sianipar	M. Noor	Usman Rukka	Rachman Adiwirja	078/MPDN/SK/65
	G.C.C. Imbar ***	Nuruddin Lassape *	Usman Rukka *	079/MPDN/SK/65
etrologi Makasar	Nuruddin Lasappe	Hasan Basri ***	Nuruddin Lasappe *	080/MPDN/SK/65
	Hasan Basri ***	Drs A.N. Pantow ***	Hasan Basri ***	081/MPDN/SK/65
	H.C.H. Andresen	Gde Putu Wirata BBA	Drs A.N. Pantow ***	082/MPDN/SK/65
	Wentjen Semadhi ***	Handono Warih *	Gde Putu Wirata BBA *	083/MPDN/SK/65
etrologi Bali	G. Widharto ***	Patty ***	Bondan	084/MPDN/SK/65
	Patty ***	Siahainenia *	Setijowidjojo *	
etrologi Ambon	Siahainenia	R. Soeprapto *	Patty ***	085/MPDN/SK/65
enaeni	Sirjono ***		Djoedjoe b. Soemanta	086/MPDN/SK/65
			R. Soeprapto	087/MPDN/SK/65

Ketiga :

Terhitung mulai tanggal 17 Agustus 1965 maka:

- a. Segala tanggung-djawab, tugas, hak, kewadajiban serta seluruh perlengkapan Bank Indonesia termasuk Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelajan, Bank Negara Indonesia, Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara beralih kepada Bank Tunggal yang bernama „Bank Negara Indonesia”;
- b. Semua pegawai-pegawai Bank Indonesia termasuk Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelajan, Bank Negara Indonesia, Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara, pada Kantor Pusat-nja masing-masing dan pada Kantor-Kantor lainnja, menjadi pegawai-pegawai Bank Tunggal yang bernama „Bank Negara Indonesia”;
- c. Sampai ada ketentuan lebih lanjut semua pegawai Bank Indonesia termasuk Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelajan, Bank Negara Indonesia, Bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara, ditetapkan dalam kedudukan, pangkat dan wewenang serta kewadajiban semula pada masing-masing Bank tersebut, dengan pengertian bahwa melalui saluran-saluran organisatoris mereka bertanggung-djawab kepada Menteri Urusan Bank Sentral.

Keempat :

Sampai ada ketentuan lebih lanjut, maka para Gubernur-Gubernur Pengganti dan Direktur-Direktur Bank Indonesia, termasuk Presiden Direktur/Direktur Utama dan Direktur-Direktur

Sambungan dari hal. 18

VI. Kepada chalajak ramai diminta bantuan dari pers untuk menjatakan bahwa perubahan struktur perbankan itu nanti tidak akan menjulitkan mereka. Mereka dapat melangsungkan hubungan mereka sebagaimana biasa pula dan mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya pula.

VII. Achirnja perlu dijelaskan mengenai adanya pertanyaan², bahwa dibidang badan² tertinggi pemerintahan terdapat pemetjahan² dan pembahagian, tetapi djustru diperbankan terlihat arah yang sebaliknya dari pada itu.

Adanja pemetjahan pembagian dibidang Departemen dalam kelompok-kelompok tertentu djanganlah sampai dilihat bahwa pengintegrasian dari Bank² ini bertentangan dengan tindakan Pemimpin Besar Revolusi dalam bidang pemerintahan.

Maksud dari pada pembagian tugas didalam pemerintahan diantara Departemen² yang lebih banyak adalah sama dengan maksud pengintegrasian Bank-Bank ke-Bank Tunggal jaitu nutuk mentjapai keterarahan dengan penetapan kebi-

dari Bank-Bank Umum Negara (termasuk bekas B.K.T.N.) dan Bank Tabungan Negara yang berdasarkan Penetapan Presiden No. 16 tahun 1965 ditetapkan kedudukannya berturut-berturut sebagai Gubernur-Gubernur Pengganti dan Direktur-Direktur Bank Indonesia, terhitung mulai tanggal 17 Agustus 1965 berturut-turut ditetapkan sebagai Gubernur-Gubernur Pengganti dan Direktur-Direktur dari Bank Tunggal yang bernama „Bank Negara Indonesia”.

Kelima :

Penjelesaian peleburan setjara fungsionil, organisatoris, personil dan administratif, dilakukan berdasarkan azas-azas sentralisasi, spesialisasi dan dekonsentrasi, dan dilakukan setjara tahap demi tahap dalam waktu yang sesingkat-singkatnja, dengan ketentuan bahwa sampai ada ketentuan lebih lanjut masing-masing unit Bank tersebut maksud dalam pasal Kedua diatas melandjutkan usaha-usahanja seperti sediakala.

Kenam :

Ketentuan-ketentuan selandjutnja dalam rangka pelaksanaan tahap-tahap peleburan termaksud akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Urusan Bank Sentral.

Ketujuh :

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1965.

MENTERI URUSAN BANK SENTRAL

ttd.

(JUSUF MUDA DALAM)

djaksanaan dibawah satu komando, sehingga tertjapai efisiensi dan efektivitas dalam tindakan. Untuk keperluan itu maka unit² dari pemerintahan dapat menspesialisasikan dirinja terhadap bidang² yang khusus. Begitu pula Bank Tunggal ini akan membentuk didalamnja kesatuan² yang akan mendjalankan spesialisasi di bidang² tertentu.

Spesialisasi pada dewasa ini dalam bank² Pemerintah bentuk yang lama tidak tertjapai dengan baik, karena dalam bidang perbankan, masing-masing bank Pemerintah meliputi pula bidang pekerdjaan yang „overlapping”, sehingga menimbulkan „doublures” dalam pembiajaan² dan terdapat kesimpangsiuran.

Dengan integrasi ini nanti akan tertjapailah satu sentralisasi dalam kebidjaksanaan dan komando, spesialisasi setjara intern dalam hal melandjutkan sektor² ekonomi dalam masyarakat dan dekonsentrasi dalam managementnja. Dan yang lebih penting lagi dengan integrasi ini terdapatlah kesatuan djiwa dari segenap manusiaja. Pimpinan maupun para pedjabat serta seluruh karyawanja.

Demikian uraian Menteri Urusan Bank Sentral

PENERTIBAN PENJELenggaraAN PEMASUKAN BARANG² DARI LUAR NEGERI DAN PENGGUNAAN PELABUHAN²

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 176 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang :

- a. bahwa dalam penjelenggaraan pemasukan projek², barang² modal kebutuhan² produksi dan rakjat banjak dari luar negeri berdasarkan kredit luar negeri, production sharing, deferred payment, pampasan dan sebagainya perlu terdjamin terlaksananja tudjuan² jang telah direntjanakan dan dihindarkan terdjadinja pemborosan² dan kerugian² devisa sebagai akibat tidak atau kurang adanja rentjana jang konkrit baik mengenai pendatangan, penjimpanan/penampungan barang² dan penjalurannja maupun pembiajaan rupiahnja;
- b. bahwa pelabuhan dalam rangka pembangunan negara menempati kedudukan jang sangat menentukan, sehingga untuk mendjamin kelantjarannja dianggap perlu mengambil langkah² dan tindakan² penertiban terhadap sebab² utama jang menimbulkan kematjetan² dan ketidak kelantaran dalam bidang kepelabuhan.
- c. bahwa telah terdjadi kongesti terus-menerus dipelabuhan Tandjung Priok disebabkan oleh karena:
 - a). Kesukaran² jang terletak dalam bidang keuangan.
 - b). Tidak adanja persiapan tempat² penjimpanan/penampungan diluar pelabuhan.
 - c). Kekurangan disiplin para penjelenggara;

Meningat :

- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 21 tahun 1961 tentang Penetapan Priorita dan Prosedur Kredit Luar Negeri Dalam Hubungan Pelaksanaan Projek² Pembangunan Nasional Semesta Berentjana (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 314);
- Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia No. 4/M.P./Finec/1961 tanggal 10 Djuni 1961;
- Surat Edaran Menteri Pertama Republik Indonesia No. 8/M.P./63 tanggal 25 Maret 1963 perihal izin tertulis untuk mengadakan perundingan tingkat Pemerintah mengenai draftcontract pembangunan projek dengan pihak Luar Negeri;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 25 tahun 1964 tentang kebidjaksanaan Ekonomi dan Keuangan untuk mengatasi keadaan sekarang dan waktu dekat (Lembaran Negara tahun 1964 No. 68);
- Surat Wakil Perdana Menteri I No. B/I/3995/H. 11/1964 tanggal 21 Oktober 1964 perihal kredit Luar Negeri;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 235 tahun 1964 tentang Panitia Menteri Urusan Kredit Luar Negeri atas dasar Production Sharing;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia/Pangli 1964 tanggal 27 Djuni 1964 „Panitia Negara ma Tertinggi Angkatan Bersendjata No. 165/PLMT. Tahun Indonesia dengan Luar Negeri”;
Urusan Kontrak² Ekonomi Keuangan antara Republik
- Surat Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan pengawasan No. BUFC 6-1-25 tanggal 8 Pebruari 1965 perihal Djaminan Kredit dalam dan Luar Negeri;
- Ketetapan MPRS. No. VI/MPRS/1965 tentang Banting Stir untuk Berdiri diatas kaki sendiri dibidang ekonomi dan pembangunan;

Menengar :

- Menteri Urusan Bank Sentral, Menteri Perhubungan Laut, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiaiaan dan pengawasan, Menteri Urusan Anegaran Negara, Kuasa Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri, Panglima Kesop II Kotoe dan III Kotoe/Menteri/Panglima Angkatan Laut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PENERTIBAN PENJELenggaraAN PEMASUKAN BARANG² DARI LUAR NEGERI DAN PENGGUNAAN PELABUHAN², sebagai berikut;

Pertama :

Dalam penjelenggaraan pemasukan Projek² dan barang² modal Pemerintah maupun swasta, para penjelenggara harus memenuhi dan mengindahkan semua ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan² dan Surat² Keputusan tersebut diatas agar segala kegiatan dibidang pembangunan dapat dikoordinasi dengan sebaik-baiknya untuk mendjamin kelantjaraan dan efisiensi dalam pelaksanaannya.

Kedua :

Pelaksanaan sesuatu impor tersebut pada diktum PERTAMA dan pengeluaran izin impor devisa yang dibenarkan setelah :

- a) mendapat persetujuan dari Presiden atau Presidium Kabinet Republik Indonesia;
- b) dalam hal pembiayaan menjadi beban negara, mendapat persetujuan tertulis dari Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan, Departemen Urusan Anggaran Negara dan Bank Pembangunan Indonesia sedangkan yang mengenai devisa dari Departemen Bank Sentral.

Ketiga :

Setiap rentjana proyek harus memuat :

- a) rentjana mengenai tjara² penampungan dan tempat² penjemputan barang yang diterima dari luar negeri;
- b) rentjana penjelenggaraan pengangkutan barang² dari pelabuhan ketempat tersebut.

Ke-empat :

Dalam setiap pemberian surat djajah dan izin devisa harus ditjantumkan sjarat, bahwa pihak penjelenggara wajib mengikatkan diri untuk :

- a) melaksanakan sesuatu izin dengan penuh tanggung-djawab sesuai dengan tudjuan yang telah ditetapkan;
- b) memenuhi setiap kewadajiban keuangan tepat pada waktunya ;
- c) dalam waktu selambat-lambatnya 15 hari setelah pembongkaran mengeluarkan barang² dari gudang² dieporeze termasuk tempat² penimbunannya dengan memenuhi sjarat² yang berlaku.

Kelima :

- a) Terhadap para penjelenggara (Badan² dan Instansi² resmi Pemerintah) yang menimbulkan kerugian² ba negara sebagai akibat tidak dipenuhinja ketentuan² dalam surat keputusan ini, akan diambil tindakan korektif;
- b) terhadap para penjelenggara lainnya akan dikenakan hukuman pemberhentian sementara/pentjabatan usaha dan pensitaan atas barang² yang diimpor;
- c) pelaksanaan ketentuan² pada huruf a dan b diatas dilakukan oleh pihak yang berwenang yang ditugaskan dalam bidang tersebut.

Ke-enam :

Keputusan ini berlaku pada hari ditetapkannya.

Ketudjuh :

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Surat Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Djakarta
pada tanggal 18 Djuni 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUKARNO.

KEBIDJAKSANAAN IMPOR BARANG-BARANG DARI HONGKONG

Keputusan Wakil Panglima Besar II Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 51/WPB-KOTOE
TAHUN 1965 tertanggal 23 Djuli 1965.—

KAMI, WAKIL PANGLIMA BESAR II KOMANDO OPERASI EKONOMI.

Menimbang :

bahwa dewasa ini ternyata telah diimpor dari Hongkong barang² dagangan dari golongan, diluar golongan ekonomi I dan II seperti dimaksud dalam lampiran I dan II Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 105/M/SK/64 dalam djumlah jang besar;

bahwa kenyataan ini bertentangan dengan konfrontasi dengan apa jang disebut "Malaysia".

Mengingat :

Instruksi Wakil Panglima Besar I Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 9/Instr. WPB/KOTOE tahun 1964.

Instruksi Wakil Panglima Besar I Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 18/Instr. WPB/KOTOE tahun 1964.

Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan no. 77/UBS/1964.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

Kebidjaksanaan impor barang-barang dari Hongkong.

Pertama :

Impor barang dagangan dari Hongkong dibatasi kepada barang² jang termasuk dalam golongan Ekonomi I dan II seperti dimaksud dalam lampiran I dan II Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 105/M/SK/64 tertanggal 22 April 1964.

Kedua :

Barang² dagangan dan barang² kiriman berasal dari Hongkong jang termasuk golongan Ekonomi III dan IV tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 105/M/SK/64 tertanggal 22 April 1964 dan jang hendak dimajukan dalam daerah pabean Indonesia setelah Surat Keputusan ini berlaku mendjadi milik Negara tanpa ganti kerugian apapun.

Ketiga :

Menteri Urusan Negara menentukan tudjuan impor barang² jang mendjadi milik Negara tersebut pasal Kedua.

Ke-empat :

Terhadap barang² dagangan berasal dari Hongkong jang termasuk golongan Ekonomi III dan IV Surat Keputusan Menteri Perdagangan tersebut, jang sampai saat berlakunja peraturan ini telah berada di Daerah² Pelabuhan di Indonesia, dan belum mendapat idzin dari Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri dan belum diidzinkan keluar oleh Pabean diperlakukan sebagai berikut:

- Disamping pungutan² berdasarkan peraturan² jang berlaku dibebani lagi pungutan tambahan dalam bentuk meerwinst sebesar 100% dari djumlah pungutan² lazim itu, jang ditugaskan pungutannja pada Direktorat Bea dan Tjukai.
- Kesempatan ini diberikan kepada jang berkepentingan sampai tanggal 16 Agustus 1965.
- Barang², jang oleh jang berkepentingan sampai batas waktu tersebut ajat (b) diatas tidak dipenuhi kewadajiban² dan pembebanan² tersebut ajat (a) diatas, mendjadi milik Negara tanpa ganti kerugian apapun.
- Pasal ketiga berlaku untuk barang² tersebut ajat c.

Kelima :

Barang² dagangan berasal dari Hongkong jang termasuk golongan Ekonomi III dan IV Surat Keputusan Menteri Perdagangan tersebut, jang sebelum peraturan ini berlaku telah mendapat idzin dari Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri, baik dengan menggunakan devisen Pemerintah, maupun devisen lainnja, diidzinkan masuk.

Keenam :

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinja memerintahkan pengundangan keputusan Wakil Panglima Besar II Komando Tertinggi Operasi Ekonomi ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 23 Djuli 1965.

KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI
WAKIL PANGLIMA BESAR II

ttd.

Dr. J. LEIMENA

C.V. „NAROTAMA”

EXPORTERS, IMPORTERS & GENERAL AGENTS

DJALAN TOKO TIGA 55

TELEPON 21686

DJAKARTA KOTA

Cables : NAROTAMA DJAKARTA

EXPORT:

- * **COPRA**
- * **RUBBER**
- * **PEPPER**
- * **COFFEE**
- * **LUMBER**
- * **NUTMEGS**

IMPORT:

- * **ALL KINDS OF COMMODITIES**

PENTJABUTAN UNDANG-UNDANG KRISIS IMPOR 1933

UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1965.

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1962
TENTANG PENTJABUTAN UNDANG² KRISIS IMPOR 1933 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962
NO. 44) MENDJADI UNDANG-UNDANG.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ekonomi Terpimpin dan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, perlu segera diambil tindakan² penertiban mengenai peraturan² jang tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini;
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada sub 1, dianggap perlu meninjau kembali undang-undang Krisis Impor 1933;
3. bahwa karena keadaan mendesak Pemerintah berdasarkan pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar telah mengatur hal tersebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 2 Undang-undang Dasar, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu ditetapkan mendjadi Undang-undang;

Mengingat :

1. pasal² 5 ayat 1, 20, 22 dan pasal 33 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. I dan II MPRS/1960;
3. Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 2/K.O.T.O.E. tertanggal 18 Mei 1962;
4. Undang-undang Krisis Impor 1933;

Dengan persetujuan :

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1962 TENTANG
PENTJABUTAN UNDANG-UNDANG KRISIS IMPOR 1933 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962
NO. 44) MENDJADI UNDANG-UNDANG, sehingga berbunji sebagai dibawah ini :

Pasal 1.

Mentjabut Undang-undang Krisis Impor 1933 (L.N. 1933 No. 349) serta semua peraturan pelaksanaanja.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannja dan mempunjai daja surut sampai tanggal 3 Agustus 1962.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undangkan di Djakarta
tanggal 14 Djuni 1965
RETARIS NEGARA,

t.t.d.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 14 Djuni 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 No. 55.

SUKARNO

Retribusi B L L D

Pimpinan Biro Lalu Lintas dalam pengumuman-nya tertanggal 31-7-1965, mengenai **Peraturan Retribusi Biro Lalu Lintas Devisa**, menetapkan sebagai berikut:

1. Terhadap ekspor barang-terketjual ekspor minjak tanah kesat dan lain-lain hasil minjak tanah-dikenakan retribusi untuk kepentingan Biro sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) persen dari Nilai Transaksi Rupiah dari djumlah harga penje-
rahan dalam valuta asing.

Retribusi ekspor dipungut oleh bank devisa pada waktu jang bersamaan dengan dilakukannya perhitungan dengan eksportir mengenai ekspor jang diselenggarakan.

Mengenai pemungutan retribusi atas ekspor minjak tanah kesat dan lain-lain hasil minjak tanah diadakan peraturan sendiri.

2. Terhadap impor barang-terketjual impor barang perusahaan minjak dan impor beras, kapas kasar, pupuk, kertas koran, bahan obat²an sekedar termasuk Golongan Ekonomi I dan buku² ilmu pengetahuan sekedar termasuk Golongan Ekonomi I — dikenakan retribusi untuk kepentingan Biro sebesar 5 (lima) persen dari Nilai Transaksi Rupiah dari valuta asing jang tersebut dalam kontrak valuta. Retribusi impor dipungut sekaligus oleh Bank devisa pada waktu penutupan kontrak valuta.
Mengenai pemungutan retribusi atas impor barang oleh perusahaan-perusahaan minjak diadakan peraturan tersendiri.

3. Terhadap segala djenis transfer jang disalurkan melalui bank devisa jang tidak mengenai pengimporan barang dikenakan retribusi untuk kepentingan Biro sebesar 5 (lima) persen dari

Nilai Transaksi Rupiah dari djumlah valuta asing jang ditransfer keluar negeri.

Retribusi ini dipungut oleh bank devisa pada waktu penjelenggaraan transfer.

4. Hal-hal lainnja untuk mana diperlukan izin dari Biro dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000 (seribu Rupiah) untuk setiap izin.
5. Pembayaran retribusi untuk kepentingan Biro jang tidak dipungut oleh bank devisa dapat bajat:
 - a. dengan wesel pos
 - b. pada kas Biro
 - c. dengan penjetoran pada rekening-giro Bank di Bank Indonesia, Djakarta.
6. Djumlah retribusi dibulatkan mendjadi satu Rupiah, jaitu 50 sen keatas didjadikan satu Rupiah dan dibawah 50 sen ditiadakan.
7. Retribusi jang dipungut oleh bank devisa untuk kepentingan Biro harus dibukukan/diseterorkedalam rekening Biro pada Bank Indonesia Djakarta.
8. Izin Biro jang dikeluarkan semata-mata untuk kepentingan perwakilan diplomatik dan konsululer asing serta badan internasional semata-mata itu berikut pegawainja jang berstatus diplomatik atau konsuler, tidak dikenakan retribusi.
9. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1965.

Dengan demikian maka Pengumuman Biro Lalu Lintas Devisa No. 2/U/BLLD/65 tanggal 21 Februari 1965 jo. 4/U/BLLD/65 tanggal 23 Februari 1965 ditarik kembali.

P E N D J E L A S A N

ATAS UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1965

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1962 TENTANG PENTJABUTAN UNDANG-UNDANG KRISIS IMPOR 1933 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 44) MENDJADI UNDANG-UNDANG.

U M U M :

Undang-undang ini diadakan oleh Pemerintah Hindia Belanda guna membendung arus barang dari Negeri dengan djalan pembatasan barang² impor, terutama ditudjukan terhadap sistim dumping jang diadukan oleh Djepang, dalam rangka melindungi industri di Negeri Belanda. Karena pada waktu ini Undang-undang Krisis Impor tersebut djuga tidak dipergunakan dalam pembatasan barang² impor dan kebidjaksar dalam impor didasarkan antara lain atas persetudjuan dagang antara Negara, maka Undang-undang itu p
ditjabut.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 dan 2. Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 2760.

SAVE YOUR FOREIGN EXCHANGE

on IMPORTS of : Complete plants spinning mill
sugar plant, power plant etc.

rolling stock and equipment,
telecommunications equipment,
other industrial machinery & equipment,

Commodities textile, cambrics, cottonyarn, rice, fertilizers etc.

ensure that your specifications are fully met by foreign suppliers.

Our CERTIFICATE of INSPECTIONS can help you to control payments !

for TRUSTWORTHY and IMPARTIAL INSPECTIONS of your goods

use the service of :

SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA, Ltd.

(S. C. I.)

head office :

djl. palatehan I blok K V/31 Kebajoran
phone : 70036 p.o. box 2377
djakarta

as affiliate company of the world-wide organization of
GENERAL SUPERINTENDENCE COMPANY Ltd., GENEVA

(Société Générale De Surveillance S.A.)

with branch/agent all over the world.

recommended by the
Department of Trade of the Republic of Indonesia

Varia berita singkat:

Ekonomi/Perdagangan Internasional

- 1. Republik Rakyat Tiongkok — AKAN BELI EMAS LAGI:** Sebagai tindakan preventif terhadap akibat-akibat yang merugikan daripada penurunan nilai Pound Sterling dan ketidakstabilan Dollar Amerika Serikat, R.R.T. akan lebih banyak lagi membeli emas dipasaran London. Ini dimungkinkan karena R.R.T. mempunyai tjukup banyak devisa untuk membeli sampai kira² sebanyak 100 ton.
- 2. Ghana — PERUSAHAAN NIAGA NEGARA:** Pemerintah telah memutuskan mendirikan suatu perusahaan niaga negara dengan nama Perusahaan Niaga Rakyat dengan bidang kegiatan mengimpor dan menyalurkan barang-barang konsumsi.
- 3. Maroko — PELABUHAN BEBAS TANGER:** Untuk merangsang penggunaan pelabuhan bebas Tanger yang dalam waktu singkat ini akan diresmikan penggunaannya, maka pajak sebesar 1% ad Valorem yang selama ini dibebankan atas barang-barang yang diperuntukkan bagi daerah pelabuhan bebas tersebut, dihapuskan.
- 4. Meksiko — PENGADAAN BAHAN MAKANAN:** Suatu perusahaan negara yang bergerak dibidang pengadaan bahan makanan (De Compania Nacional de Subsistencias Populares), telah direorganisir/diperluas sedemikian rupa sehingga menjadi suatu organisasi yang didesentralisir agar manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh para petani/produsen. Organisasi ini terutama ditujukan agar petani mendapat keuntungan yang layak, penduduk mendapat tjukup bahan makanan pokok serta menjaga nilai gizi dan kwalita daripada bahan-makanan tersebut.
- 5. Inggris — KRISIS POUND STERLING:** Inggris akan menyesuaikan diri dengan kemampuannya untuk mentjegah terdjadi krisis kepertajaan terhadap Pound Sterling. Masa pindjaman-pindjaman telah diperpendek dan pengeluaran untuk keamanan/perang dikurangi.
- 6. Pilipina — INDUSTRI DALAM NEGERI PERLU DILINDUNGI:** Kalangan industri Pilipina telah mendesak agar segera diambil tindakan untuk melindungi industri dalam negeri terhadap saingan barang-barang luar negeri yang mungkin membandjiri Pilipina. Djika tidak saingan dari luar tersebut akan mengakibatkan banyak industri gulung tikar.
- 7. Negeri Belanda — RUMANIA:** Awal Oktober jang suatu misi ekonomi Rumania akan mengunjungi Negeri Belanda atas undangan Kementerian Perekonomian Negeri Belanda. Dimaksudkan untuk mengenal lebih dekat mengenai kegiatan-kegiatan dibidang perindustrian, terutama jang meliputi industri-industri petro-kimia, elektroteknik dan bahan-makanan.
- 8. Brazilia — PANEN GULA:** Menurut taksiran Lembaga Gula dan Alkohol Brazilia, produksi gula untuk djangka waktu Djuni 1965 s.d. Djuni 1966 akan berdjumlah sebanyak 70 djuta karung. Dan dengan didirikannya pabrik-pabrik baru, diharapkan produksi tahun 1970 akan menjadi sebesar 100 djuta karung. Konsumsi dalam negeri setahunnja adalah sebesar 40 djuta karung.
- 9. Sri Lanka — PERKEMBANGAN PERIKANAN:** Dientahkan untuk memajukan perikanan industri perikanan yang akan dilaksanakan oleh Ceylon Fisheries Corporation, meskipun dengan djalan ini dapat dipastikan toeh Sri Lanka belum dapat memenuhi kebutuhan akan ikan didalam negeri. Meskipun demikian rencana ini dimaksudkan terutama untuk menjangkau ekspor hasil tersebut, dan devisa yang diperoleh akan dipergunakan untuk mengimpor ikan kering berkwalita rendah serta untuk pengembalian pengeluaran-pengeluaran investasi.
- 10. Republik Demokrasi Vietnam — KAPAL 1000 ton PERTAMA:** Dengan bantuan tenaga ahli dari Republik Rakyat Tiongkok, telah ditugaskan sebuah kapal berukuran 1000 ton di Haiphong. Ini merupakan produksi kapal berukuran 1000 ton yang pertama yang dihasilkan oleh R.D.V. Kapal tersebut diberi nama "20 Djuli" jaitu hasil penandatanganan Perdjandjian Geneva.
- 11. Chili — PENURUNAN HARGA ETJERAN TEH:** Harga etjeran teh yang dihasilkan oleh negara-negara anggota Latin American Free Trade Association (LAFTA), oleh pemerintah diturunkan.

Bersambung ke hlm. 1

Varia berita singkat:

Ekonomi/Perdagangan Dalam Negeri

1. Kegiatan Transshipment P.N. Pelni dialihkan kepada P.N. Djakarta Lloyd.

Dalam rangka menjempurnakan dan melengkapi ketentuan-ketentuan tugas penjelenggaraan dan perusahaan angkutan laut dimana fungsi transshipment menempati posisi yang penting serta menentukan sekali dalam proses pelaksanaan ekspor dan impor, perlu adanya konstruksi tanggungjawab management dan pengapalan ekspor dan impor sehingga memungkinkan dan mempermudah adanya kontrol.

Dengan pertimbangan tersebut, maka dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Laut tanggal 8 Djuli 1965 No. DRP. 6/29/15 yang mulai berlaku tanggal 1 Djuli 1965 ditetapkan pengalihan usaha dan kegiatan transshipment muatan ekspor maupun impor dari P.N. PELNI kepada P.N. DJAKARTA LLOYD.

2. Hanya 5% penduduk Indonesia mempergunakan Bank.

Menteri Urusan Bank Sentral Jusuf Muda Dalam menjelaskan bahwa rakyat Indonesia yang berjumlah lebih kurang 105 djuta ini hanya 5% yang mempergunakan manfaat bank-bank, baik bank umum maupun bank tabungan. Berhubung dengan sedikitnya perhatian masyarakat kepada bank, maka Pemerintah dewasa ini mengusahakan penjebar luasan pengertian dan penggunaan bank.

Dewasa ini ditiap tempat, dimana terdapat kegiatan bank, ada empat buah bank yang sama tugasnya. Dengan disatukannya bank-bank umum sesuai dengan Keputusan Presiden, maka kegiatan bank dapat diperluas daerahnya sehingga masyarakat lebih mengetahui dan lebih merasakan arti bank.

Demikian Menteri Jusuf Muda Dalam.

3. Pendapatan Hasil bea dan tjukai sampai bulan Mei 1965 Rp. 270 milyar.

Pendapatan Negara yang diperoleh dari hasil-hasil Bea dan Tjukai, menurut Menteri Urusan Negara Drs. Hugeng Imam Santoso, selama lima bulan pertama dari Djanuari sampai bulan Mei 1965 yang baru lalu, sudah meliputi Rp. 270 milyar.

4. Modal ex Inggris akan dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan politik konfrontasi terhadap projek neokolonialisme "British Malaysia", maka oleh Pemerintah ditegaskan bahwa perusahaan-perusahaan modal ex Inggris telah diambil alih oleh buruh-buruhnya dan kini mulai dikuasai oleh Pemerintah.

Penegasan Pemerintah ini tertantum dalam nota penjelasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1965 yang baru-baru ini telah disahkan oleh sidang D.P.R.G.R.

Mengenai berapa prosen dari perusahaan modal monopoli asing yang hingga kini telah diambil alih/dikuasai oleh Pemerintah, dalam bagian lain dari nota penjelasan itu disebutkan, yaitu lebih kurang disekitar 90%. Tidak dijelaskan, apakah dari jumlah itu sudah termasuk penguasaan terhadap modal monopoli asing Inggris. Hanya nota penjelasan itu menambahkan, bahwa pelaksanaan pengambil-alihan perusahaan-perusahaan modal monopoli asing itu adalah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar '45 pasal 33.

5. Produksi gula terus meningkat.

Produksi gula Perusahaan Perkebunan Gula Negara sedjak beberapa tahun belakangan ini telah menunjukkan angka-angka yang meningkat.

Dalam tahun 1962 angka produksi tertjatat 584.000 ton, dalam tahun 1963 sama, sedang dalam tahun 1964 dan 1965 terus meningkat, masing-masing dari 650.000 ton menjadi 750.000 ton.

Dibidang ekspor P.N. Gula telah pula meng-ekspor gula kebeberapa negara di Eropa dan Djepang. Menurut tjatatan, dalam tahun 1962 telah diekspor sebanyak 61.048 ton, tahun 1963 sebanyak 161.439 ton, tahun 1964 sebanyak 88.047 ton, sedang untuk tahun 1965 direntjanakan sebesar 200.000 ton.

6. Batu Tahan api penemuan Pabrik Semen Gresik.

Pabrik Semen Gresik didalam rangka Ber-

dikari, telah berhasil membuat batu tahan api (fire brick) sebagai pelapis-pelapis tungku jang sampai sekarang ini bahan-bahan tersebut selalu diimpor sedjumlah ratusan ribu dollar setiap tahunnja.

Batu tahan api jang telah ditemukan oleh Pabrik Semen Gresik tersebut dibuat dari tjampuran terak dan semen dengan perbandingan 3 : 1. Batu itu telah diudji dan mampu pada suhu 800 dradjat Celcius, sedang biasanja batu-batu jang diimpor untuk lapisan tungku itu mampu mentjapai suhu 1500 dradjat Celcius.

Penemuan baru tersebut kini sedang terus disempurnakan, sehingga diharapkan akan dapat menjamai bahan tersebut jang berasal dari impor.

7. "Combined Team" hasilkan denda damai
Rp. 35.351.000,-

Purel Kantor Besar Direktorat Bea dan Tjukai mengabarkan, bahwa dalam sidang-sidang jang diadakan dalam 3 minggu terachir ini oleh "Combined Team" telah diputuskan perkara-perkara pelanggaran dalam bidang impor serta Ordonansi Bea sebagai berikut:

- a. Impor — 25 perkara dengan dendadamai Rp. 35.081.000,—
- b. Pasal 1 Ord. Bea — 15 perkara dengan dendadamai Rp. 270.000,—

Perkara-perkara dalam bidang impor jang diadakan oleh Direktorat Bea dan Tjukai Daerah I Tandjung Priok tersebut kesemuanja berkisar pada selisih pemberitahuan harga dalam valuta asing, jang berakibat kurangnya dibayar bea-bea masuk.

8. **Projek-projek Sandang Mandataris akan selesai pada waktunja.**

Sebagaimana diketahui, Presiden selaku Mandataris MPRS, telah menginstruksikan agar Projek-Projek Sandang/Mandataris selesai dan dapat berproduksi pada tahun 1966 jang akan datang. Projek-Projek Sandang Mandataris itu terdiri dari Projek-Projek Pemintalan di Djakarta, Tjipadung (Bandung), Setjang (Magelang), Grati (Pasuruan), Lawang, Tohpati (Bali) dan Projek-Projek Pertenunan di Kamal (Madura) dan Makassar.

9. **Dinas Weselpos Berlangganan**

Dalam rangka meningkatkan service, maka mulai tanggal 1 Agustus 1965 P.N. Postel membuka dinas weselpos-berlangganan dengan maksimum Rp. 50.000,—

Jang dimaksud dengan wesel-pos-berlangganan ialah pembayaran setjara kontinua pada tiap awal bulan terutama kepada para pelajar/mahasiswa tanpa menunggu datangnja poswesel jang bersangkutan. Dengan tjara berlangganan itu, maka terutama bagi para pelajar/mahasiswa perantau, jang tempat beladjaranja djauh sekali daripada tempat tinggal orang tuanja akan terdjaminlah pembayaran uang sekolah/bea pemondokan tiap bulan dan lain-lain.

10. **Bank Gatotkatja.**

Tiga buah pesawat terbang telah diinstruksikan untuk membantu Bank-Bank Pemerintah untuk melebarkan aktivitasnja dan perputaran peredaran uang dalam lapangan ekonomi dan keuangan kepulau-pulau jang tersebar luas ditanah air kita.

Pesawat-pesawat tersebut akan beroperasi sebagai "bank udara" dan diberi nama „Bank Gatotkatja”.

11. **Komunikasi antar pulau.**

60% pengangkutan antar pulau kita dewasa ini dikuasai oleh perahu-perahu lajar jang dikemudikan oleh pelaut-pelaut Bugis/Makassar dan Madura; armada ini dinamakan "armada semut".

12. **Titik berat disektor pertanian harus ditudjukan pada usaha mewujudkan swasembada pangan.**

Disektor pertanian dalam tahun ini, titik berat perhatian kita harus ditudjukan terutama², ialah mewujudkan swasembada pangan dengan berpedoman pada prinsip berdiri di atas kaki sendiri. Sebab dalam tahun ini, kita tidak mau lagi mengimpor beras, maka oleh karenanya, Pemerintah menegaskan dalam Nota Pendjelasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1965, produk bahan makanan harus betul² diperbesar dan kita tingkatkan sehingga dapat mentjukupi kebutuhan seluruh rakjat. Usaha² untuk mentjukupi target² produksi padi, palawidja dan bahan makanan lainnja, harus diberikan perhatian utama dengan biaja jang disediakan dalam anggaran disamping dengan mengerahkan segala daja dan dana, modal dan alat produksi jang telah ada.

Pokoknja kebidaksanaan dalam bidang pertanian wadajib ditudjukan pada:

- 1) Mempertinggi produksi bahan makanan berdasarkan a.l. kebidaksanaan mengencangkan konsumsi untuk menstabilkan tingkat per-

hidup yang sederhana tetapi lajak, dalam tingkat penyelesaian revolusi kita dewasa ini;

- 2) Mempertinggi produksi bahan baku sandang kearah swasembada sandang;
- 3) Mempertinggi produksi dari nilai bahan² ekspor pertanian; dan
- 4) Menjelesaikan landreform.

Dikemukakan pula, bahwa melaksanakan Komando Tavip dibidang swasembada bahan makanan (S.S.B.M.) ini, adalah merupakan tugas nasional. Karena ia bukan semata-mata merupakan tugas Departemen sadja. Tetapi, harus diselesaikan setjara nasional pula, yang berarti pengerahan tenaga massa rakjat mutlak diperlukan.

Meningkatkan produksi dalam rangka S.S.-B.M. itu meliputi pengusahaan sumber² protein hewani dalam hubungannya dengan perubahan menu rakjat yang ditunjukkan untuk mempertinggi hasil bahan makanan yang berasal dari sumber protein, dan yang dipandang mutlak perlu dalam pembangunan "nation and

character building"; mengusahakan dibidang perikanan (darat dan laut) yang bertudjuan baik untuk mentjukupi konsumsi dalam negeri maupun untuk ekspor.

Chususnja yang mengenai usaha dibidang produksi sandang, perlu diadakan gerakan penanaman kapas rakjat dengan pemberian bantuan berupa bibit, pupuk dan obat-obatan yang dikoordinir oleh Kopteksi. Disamping kapas rakjat/swasta, djuga dibidang persuteraan yang tidak membebani anggaran pembangunan, perlu digerakkan setjara lebih intensip.

Persoalan bahan-bahan kaju (pinus dan pohon-pohon karet tua) mendjadi rayon, diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama telah dapat menutup kekurangan akan bahan sandang.

Dibidang produksi bahan ekspor pertanian, dipentingkan usaha mempertahankan dan selanjutnya meningkatkan produksi bahan ekspor itu dalam waktu yang akan datang, terutama bagi bahan-bahan ekspor hasil perkebunan. Diharapkan Balai Penyelidikan menghasilkan varietas-varietas baru. Demikian antara lain pendjelasan disektor pertanian menurut Nota Pendjelasan A.P.B.N. 1965.

VARIA BERITA SINGKAT . . . INTERNASIONAL

ambungan hlm. 30.

runkan dengan 30%. Teh dari sumber-sumber diluar LAFTA dapat diperdagangkan tanpa pembatasan harga. Tindakan ini dimaksudkan untuk memajukan konsumsi teh Amerika Latin. Argentina dan Brazilia adalah produsen teh yang berarti di Amerika Latin.

Amerika Serikat — PAMERAN DAGANG DI SAN FRANCISCO: Pada tgl. 12 — 22 Mei 1966 j.a.d., di San Francisco akan diselenggarakan U.S. World Trade Fair yang akan mengambil tempat di Civic Auditorium Brooks Hall. Segala matjam barang akan dipamerkan, termasuk bahan makanan dan minuman.

Portugis — IMPOR TEMBAKAU NAIK: Bulan-bulan pertama tahun ini tampak kenaikan pembelian tembakau oleh Portugis. Negara-Negara supplier menurut urutan besarnya djumlah yang diimpor adalah dari: Amerika Serikat, Rodesia, Angola, Mozambique dan Junani.

14. **Djepang — AKAN PERBESAR IMPOR DARI NEGARA-NEGARA TETANGGA:** Pada bulan ini telah didirikan Japan Rubber Importers Association, yang bertudjuan memajukan kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan impor karet; dan ini merupakan sebagian daripada usaha Djepang untuk memperbesar impor hasil-hasil bumi dari negara-negara yang sedang berkembang, terutama Asia Tenggara.
15. **Djepang — EXPORT DRIVE:** Dalam rangka merangsang ekspor, Djepang telah memutuskan a.l. untuk djuga memberikan deffered payment export kepada negara-negara Komunis, dan diharapkan kebidjaksanaan ini akan dapat dipergunakan baik terhadap barang-barang konsumsi maupun barang modal.
16. **Australia — PERLUASAN INDUSTRI KARET SINTETIS:** Sebuah perusahaan karet sintesis, Australian Synthetic Rubber Company, akan memperluas usahanya dengan memproduksi karet sintesis polybutadiene dan diharapkan achir tahun 1966 telah mulai menghasilkan.

P. T. K A R K A M

(P.T. KULIT ATJEH RAYA KAPTEN MARKAM)

KANTOR PUSAT : Djl. Pintubesar Selatan 97 atas Djakarta-Kota
Telpon 23368 - 22644 - 21092
alamat kawat : **KARKAM DJAKARTA**

KANTOR TJABANG : **M E D A N**
P e k a n b a r u
D u m a i
R e n g a t
D j a m b i

KANTOR PERWAKILAN : **T e m b i l a h a n**
B e n g k a l i s
P a l e m b a n g
S i b o l g a

PPN P.T. KARKAM : **A e r m o l e k (R i a u)**
Perusahaan Remilling P.T. KARKAM : **Kampung Lalang Sunggal**
(Sumatra Utara)

EXPORTIR : **K A R E T**
K O P R A
dan hasil perkebunan lainnya

IMPORTIR : **BARANG² KEPERLUAN PEMBANGUNAN**
KENDARAAN²
MESIN² DIESEL
untuk berbagai matjam keperluan
MESIN² KAPAL

* * *

BANK² KAMI IALAH : **BANK INDONESIA**
BANK NEGARA INDONESIA
BANK DAGANG NEGARA
BANK KOPERASI TANI & NELAJAN

* * *

** Dalam rangka „banting setir” untuk „berdikari” dibidang ekonomi dan pembangunan,
P.T. KARKAM melaksanakan kegiatan²-nja semata-mata untuk membantu Pemerintah.

** Sembojan kami ”MADJU TERUS PANTANG MUNDUR” UNTUK KEMENANGAN
REVOLUSI dan UNTUK TERTJAPAINJA MASJARAKAT SOSIALIS INDONESIA.

DJARINGAN ANGKUTAN LAUT SAMUDRA NASIONAL

Dengan surat keputusan Menteri Perhubungan laut No. Dpe. 1/12/10 telah ditetapkan Peraturan tentang Djaring-djaring pelajaran Samudra.

Djaring-djaring pelajaran Samudra mempunyai tugas :

melayani dan mengembangkan angkutan laut di bidang perdagangan umumnja ekspor impor khususnja.

melayani dan mengembangkan angkutan laut untuk bidang produksi dan industri dan pertanian.

melayani dan mengembangkan angkutan laut dalam usaha-usaha meluaskan hubungan-hubungan antar negara.

Djaring-djaring pelajaran antara Indonesia dan Negeri dilaksanakan atas dasar 2 (dua) sistim :

Djaring-djaring pelajaran tetap (regular service), tetap dilaksanakan oleh P.N. Djakarta Lloyd sebagai pelaksana utama dengan perusahaan-perusahaan pelajaran samudra swasta nasional sebagai pelaksana pelengkap.

Djaring-djaring pelajaran antara Indonesia ke/dari/diantara Luar Negeri (Tramping-Cross Trade Service), yang dilaksanakan Perusahaan Pelajaran Samudra Swasta Nasional dengan dibantu/kerjasama oleh/dengan P.N. Djakarta Lloyd.

Seluruh djaring-djaring angkutan Laut Samudra ada sebagai berikut :

Regular Service :

Djurusan Barat :

1. Indonesia — India Timur — Pakistan Timur — Burma.
2. Indonesia — Teluk Parsi — Pakistan Barat — India Barat — Srilangka (Ceylon).
3. Indonesia — Eropa Barat — Baltic.
4. Indonesia — R.P.A. — Laut Hitam — Adriatic.
5. Indonesia — Madagaskar — Amerika Selatan.

Djurusan Timur :

7. Indonesia — Philipina — Hongkong — Muang Thai.
8. Indonesia — Republik Rakjat Tiongkok — Republik Demokrasi Korea.
9. Indonesia — Australia — Selandia Baru.
10. Indonesia — Mexico — U.S.A. — Laut Tengah.

b. Tramping-Cross Trade Service :

Djurusan Barat :

1. Indonesia — Eropa Barat — Asia Tenggara — Indonesia
2. Indonesia — U.S.S.R. — Kuba — Afrika Utara — Black Sea — (Ceylon) — India — Djepang — Indonesia.
3. Indonesia — Baltic Sea (Afrika Timur — Pakistan — Ceylon) — India — Djepang-Indonesia.
4. Indonesia — Black Sea — (Afrika Timur — Pakistan — Ceylon) — India — Djepang — Indonesia.
5. Indonesia — Black Sea (Pakistan — Ceylon — India) Asia Tenggara — Indonesia.

Djurusan Timur :

6. Indonesia — Hongkong — Djepang — Hongkong — Indonesia.
7. Indonesia — Hongkong — Djepang — Australia — Indonesia.
8. Indonesia — Hongkong — R.D.K. — R.R.T. — Hongkong — Indonesia.
9. Indonesia — Hongkong — R.D.K. — R.R.T. — Ceylon — India — Djepang — Indonesia.
10. Indonesia — Philipina — Hongkong — Djepang — Pacific Coast — U.S.A. — Djepang — Hongkong — Philipina * — Indonesia.

ISTILAH PELAJARAN

Komisi Istilah Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan Departemen P.D.K. telah menjusun istilah pelajaran :

jackstray	=	1. tali bubutan; 2. lunas samping
quarter rope	=	sutang belakang
quarter tackle	=	takal belakang
reef tackle patch	=	pelat pengikat; pelat takal
reel	=	gelendong reem = djugil
rising line	=	garis-bentuk lantai
riser	=	daerah papan
roband hltch	=	simpul hidup
rolling chock	=	1. sokong mesin dan ketel; 2. tupai-tupai
seiche	=	1. londjakan permukaan; 2. alun danau
sheet home	=	daman depan
shell chock	=	tupai-tupai lindung

skin flange	=	ulup lapis
slab line	=	tali sangga lajar
slack Seams	=	pias tambal (lajar)
slat door	=	pintu krepjak
slob ice	=	es berlanau
sluice heel	=	lunas berlubang (pada sekotji)
space ceiling	=	langit-langit ruang
spanish windlass	=	pangsi djangkar spanjol
squaring	=	menimbang gading-gading
stern bush	=	selongsong bumbung tinggi
stockholm tar	=	ter stockholm
stop	=	pasak, sumbat
strand	=	1. tebing laut; 2. utas, be- nang; 3. pantai
streamline	=	1. lampai; 2. leret, berleret arus
stream net	=	djaring djala
(to) surge	=	1. menjentak; 2. mengang- guk-angguk
sweep	=	1. bentuk keluk gading; 2. Kili-kili gading; 3. kawat parit (untuk menjapu per- airan); 4. dajung pandjang; 5. goba tali aris lajar.

**PENETAPAN HARGA PENJERAHAN KARET
DARI MAINPORTS INDONESIA**

Berlaku dari tgl. 2 Agustus s/d 7 Agustus 1965
Pengumuman B.L.L.D. No. 44/HP/65 tgl. 31-7-1965

RSS. I	US. \$.	sen 20 3/8
RSS. II	US. \$.	sen 20 1/8
RSS. III	US. \$.	sen 19
RSS. IV	US. \$.	sen 17 3/4
RSS. V	US. \$.	sen 15 3/8
THIN PALE CREPE I	US. \$.	sen 20 7/8
THIN PALE CREPE II	US. \$.	sen 19 3/4
THIN PALE CREPE III	US. \$.	sen 18 3/8
BROWN 1 x	US. \$.	sen 15 1/3
BROWN 2 x	US. \$.	sen 13 7/8
BROWN 3 x	US. \$.	sen 12 1/2
BLANKET C (No. 3 Thick Blanket Crepe)	US. \$.	sen 11 7/8
BLANKET D (No. 4 Thick Blanket Crepe)	US. \$.	sen 10 1/8
REMILLED 3 (No. 3 Thin Brown Crepe)	US. \$.	sen 11 7/8
REMILLED 4 (No. 4 Thin Brown Crepe)	US. \$.	sen 10 1/8
FLATBARK CREPE	US. \$.	sen 7 3/4
CUTTINGS A	US. \$.	sen 18 1/2
CUTTINGS B	US. \$.	sen 16 3/4
CUTTINGS C	US. \$.	sen 14 3/4
SMOKED BLANKET I	US. \$.	sen 13 7/8
SMOKED BLANKET II	US. \$.	sen 12 3/8

**PELABUHAN - PELABUHAN
DI INDONESIA
JANG TERBUKA UNTUK PERDAGANGAN
INTERNASIONAL**

(Berdasarkan Surat Keputusan Komando
Tertinggi Operasi Ekonomi) :

No. 079-22/KOTOE-KS/63 Tahun 1963	
No. 079-23/KOTOE-KS/63 Tahun 1963	
No. 079-29/KOTOE-KS/63 Tahun 1963	
1. A m b o n	— Maluku
2. A m p e n a n	— Nusa Tenggara Barat (P. Lombok)
3. Balikpapan	— Kalimantan Timur
4. Bandjarmasin	— Kalimantan Selatan
5. B e l a w a n	— Sumatra Utara
6. Blinju	— P. Bangka
7. Benoa	— Bali
8. Bitung	— Sulawesi Utara
9. Buleleng	— Bali
10. Bunju	— Kalimantan Timur
11. Djambi	— Djambi
12. Dumai	— Riau
13. Kidjang	— P. Bintan
14. Kupang	— P. Timor
15. Langsa	— Atjeh
16. Lho Seumawe	— Atjeh
17. Makasar	— Sulawesi Selatan
18. Manado	— Sulawesi Utara
19. Muntok	— P. Bangka
20. Palembang	— Sumatra Selatan
21. Panarukan	— P. Madura
22. Pangkalansusu	— Sumatra Utara
23. Pangkalpinang	— P. Bangka
24. Pasuruan	— Djawa Timur
25. Pontianak	— Kalimantan Barat
26. Probolinggo	— Djawa Timur
27. Sabang	— P. Weh
28. Sambu	— P. Sambu
29. Sampit	— Kalimantan Tengah
30. Semarang	— Djawa Tengah
31. Sibolga	— Sumatra Utara
32. Tandjungperak	— Djawa Timur
33. Tandjungpriok	— Djakarta
34. Tandjungpandan	— P. Belitung
35. Tandjung Uban	— P. Bintan
36. Tarakan	— Kalimantan Timur
37. Tegal	— Djawa Tengah
38. Teluk Bajur	— Sumatra Barat
39. Telukbetung	— Lampung
40. Tjilatjap	— Djawa Tengah
41. Tjirebon	— Djawa Barat
42. Taboali	— P. Bangka

P. N. DHARMA NIAGA

IMPOR : Mesin² untuk Pertjetakan — Industri — Pertanian — Perkebunan — Tekstil.

Mesin² Perkakas — Pendingin — Minjak Kelapa — Pompa² dan Mesin untuk Pembangunan..

Alat² Besar — Kereta Api — Mesin² Pertambangan Clark Forklifts. Mesin² DIESEL/Generating sets — Alat² RADIO/elektronik/Telekomunikasi dan motor² listrik.

PERDAGANGAN UMUM : Dalam Negeri/Antar Pulau.

INSTALASI : Telepon dan listrik dengan tenaga² Ahli.

PERBENGKELAN : Service dan pemasangan mesin.

Kantor Pusat :

Djalan Tanah Abang Barat 6 - 8 - 10 — Djakarta.
P.O. Box 2028 — Tel. 47557 - 47577 - 49978 - 41974
Telex 292

Kantor Tjabang Djakarta

Djalan Djembatan Batu 50 — Tel. 22041 - 22042 - 22043 - 22044
Djakarta Kota.

Tjabang-Tjabang :

BANDUNG — SEMARANG — SURABAJA — MEDAN —
PONTIANAK — PALEMBANG — TJIREBON — JOGJA-
KARTA — MALANG — DJEMBER — BANDJARMASIN —
MAKASSAR — MENADO — AMBON — DENPASAR —
BANDA ATJEH — PADANG dan PAKANBARU.

Pasaran lada dunia :

INDONESIA PRODUSEN LADA JANG TERBESAR DIDUNIA

Pasaran lada dunia jang sedjak perang dunia ke-II senantiasa mengalami kegontjangan sampai tahun jang lalu masih djuga belum mentjapai kestabilan.

Demikian menurut suatu laporan Departemen Pertanian AS jang terbit di Washington.

Selandjutnja laporan tersebut mengemukakan djatuhnja India sebagai produsen lada jang terbesar di dunia jang sementara itu kedudukannja digantikan oleh Indonesia. Angka² ekspor India ke AS menunjukkan kemerosotan jang dramatis jaitu : dari 21,1 djuta pound pada tahun 1962 mendjadi 8,3 djuta pound pada tahun 1963 dan merosot lagi djadi 3,8 djuta pound pada tahun 1964 jl.

Pada tahun 1950 supply India kepasar lada AS jang merupakan pasar lada terbesar didunia, rata² adalah sebanjak 35 djuta pound setahunnja.

Sementara itu dilain pihak pengiriman lada Indonesia kepasar lada AS melondjak mendjadi 44 djuta pound dalam tahun 1963, ini merupakan kenaikan

sebesar 112% dibanding dengan setahun sebelumnya. Sedang untuk tahun 1964, pengiriman lada Indonesia kepasar AS tersebut, mentjapai djumlah 44 djuta pound.

Brazilia, negara pengeksport lada jang kemungkinan dalam waktu jang akan datang akan menggantikan kedudukan India sekarang ini jaitu sebagai supplier nomor dua pada pasaran lada AS. Ekspor Brazilia kepasar lada AS pada tahun jang lalu adalah sebesar 5,2 djuta pound.

Indonesia sekarang ini mendjalankan usaha ekstensif untuk memperluas perdagangan lada. Demikian selandjutnja laporan tersebut.

Putusnja hubungan diplomatik dengan „Malaysia“ karena petjahnja konfrontasi antara kedua negara menjebabkan Indonesia mengeksport setjara langsung kepasar-pasar lada dunia hasil panen ladanja jang besar jang terdjadi 2 kali setahun serta mengangkutnja pula dari stock tahun² sebelumnya. (Antara)



Kegiatan memproduksi lada dari petani (lada) ini, harus ditimbang dengan kegiatan menemukan pemasaran jang tepat.

PENETAPAN HARGA PENJERAHAN BARANG* EKSPOR GOLONGAN II PENGUMUMAN BLLD/NO./45/HP/65.

Berlaku dari tanggal 2 Agustus s/d 14 Agustus 1965.

COPAL MALENGKET Per Kwintal.

kwality P.W.S.	Nf.	81,—
kwality M.A.P.	Nf.	69,—
kwality W.S.	Nf.	72,—
kwality W.S. (Batjan)	Nf.	59,—
kwality L.A.S.	Nf.	34,—
kwality M.A.	Nf.	23,—
kwality M.B.	Nf.	9,—

COPAL LOBA Per Kwintal.

kwality A	Nf.	79,—
kwality B	Nf.	71,—
kwality C.1	Nf.	68,—
kwality C.2	Nf.	59,—
kwality D	Nf.	55,—
kwality D.B.B.	Nf.	51,—
kwality E	Nf.	48,—
kwality I	Nf.	43,—
kwality Dust	Nf.	12,—

KULIT KERBAU Intermediate Per Kwintal.

berat 8 — 10 kg	DM.	200,—
berat 10 — 13 kg	DM.	204,—
berat 13 — 16 kg	DM.	210,—
berat 16 — 20 kg	DM.	218,—
berat 20 — up	DM.	222,—

KULIT KERBAU Second Per Kwintal.

berat 8 — 10 kg	DM.	147,—
berat 10 — 13 kg	DM.	149,—
berat 13 — 16 kg	DM.	154,—
berat 16 — 20 kg	DM.	160,—
berat 20 — up	DM.	163,—

KULIT KERBAU Pickers Per Kwintal.

berat 8 — 10 kg	DM.	113,—
berat 10 — 13 kg	DM.	117,—
berat 13 — 16 kg	DM.	123,—
berat 16 — 20 kg	DM.	131,—
berat 20 — up	DM.	139,—

KULIT KAMBING Ukuran 70 — 100 cm. First Per Lembar.

berat average 34 kg (per 100 lembar) Br. pence	54
berat average 37 kg (per 100 lembar) Br. pence	57
berat average 40 kg (per 100 lembar) Br. pence	60
berat average 50 kg (per 100 lembar) Br. pence	70
berat average 60 kg (per 100 lembar) Br. pence	80
berat average 65 kg (per 100 lembar) Br. pence	85
berat average 70 kg (per 100 lembar) Br. pence	90

KULIT KAMBING Ukuran 70 — 100 cm. Seconds Per Lembar.

berat average 34 kg (per 100 lembar) Br. pence	42½
berat average 37 kg (per 100 lembar) Br. pence	44½
berat average 40 kg (per 100 lembar) Br. pence	47½
berat average 50 kg (per 100 lembar) Br. pence	55½
berat average 60 kg (per 100 lembar) Br. pence	63
berat average 65 kg (per 100 lembar) Br. pence	67
berat average 70 kg (per 100 lembar) Br. pence	70½

KULIT GIBAS Ukuran 70 — 100 cm. First Per Lembar.

berat average 50 kg (per 100 lembar) Br. pence	50
berat average 60 kg (per 100 lembar) Br. pence	60
berat average 70 kg (per 100 lembar) Br. pence	70

9. KULIT GIBAS Ukuran 70 — 100 cm. Second Per Lembar.

berat average 50 kg (per 100 lembar) Br. pence	39%
berat average 60 kg (per 100 lembar) Br. pence	47½
berat average 70 kg (per 100 lembar) Br. pence	55½

10. KOPI ROBUSTA Per Kg.

EK. I	DM.	1,16
EK. II	DM.	1,10
EK. III	DM.	1,06
20/25%	DM.	1,03
AP. I	DM.	1,19
AP. II	DM.	1,05
G.B. 10/12%	DM.	1,06
JAVA W.I.B./I	DM.	1,69

11. KOPI ARABICA Per Kg.

Sumatera/Sibolga D.P.	DM.	2,73
Java W.I.B./I	DM.	3,52
Java W.I.B./SUP	DM.	3,70
Sulawesi Rantepao D.P.	DM.	3,38
Sulawesi Kalosi D.P.	DM.	3,78
Sulawesi Rantepao Triage	DM.	2,02
Sulawesi Kalosi Triage	DM.	2,27

12. COCOABEANS Per Kg.

kwality A	DM.	2,80
kwality B	DM.	2,65

13. PALA KUPAS Per Kwintal.

Siauw ABCD	DM.	440,—
Siauw Rimpel	DM.	410,—
Siauw BWP	DM.	331,—
Papua ABC	DM.	338,—
Papua BWP	DM.	277,—

14. PALA KUPAS MENADO — TAGULANDANG — SANGIR BESAR — AMBON Dan TERNATE (Bukan BANDA Bukan SIAUW) Per Kwintal.

ABCD	DM.	418,—
Rimpel	DM.	390,—
BWP.	DM.	315,—

15. PALA PADANG BIDJO SARING

Per Kwintal	US\$.	90,—
-------------------	-------	------

16. PALA PADANG Per Kwintal

.....	US\$.	47,—
-------	-------	------

17. BUNGA PALA Per Kwintal.

Siauw I	DM.	550,—
Siauw Gruis I	DM.	528,—
Siauw II	DM.	508,—
Siauw Gruis II	DM.	486,—
Papua I	DM.	395,—
Papua Gruis I	DM.	378,—
Papua II	DM.	360,—
Papua Gruis II	DM.	346,—

18. VANILI Per Kg.

kwality ABC	US\$.	5,21
kwality cuttings	US\$.	4,49
kwality loose-cuts	US\$.	4,49

19. COPRA CAKES/CHIPS Per Kwintal (Kadar Minyak Max. 15%).

copra cakes	DM.	13,—
copra chips	DM.	14,—
ground telquel chips/cakes	DM.	13,—

Bersambung ke hlm. 40

Sambungan halaman 39

20. **MINJAK ETERIS Per LB.**
 minjak sereh minimum 85/35% Br. pence 35
 minjak nilam kwalita I Br. pence 159
 minjak nilam kwalita II Br. pence 148
 minjak cananga ester 20 up Br. pence 174
 minjak akar wangi E.f. 1/17/-
 minjak kaju tjendana Br. pence 136
21. **KATJANG TANAH KUPAS Per Kwintal.**
 m e r a h DM. 55,-
 p u t i h DM. 64,-
22. **KATJANG TANAH BERKULIT**
 Per Metric Ton US\$. 90,-
23. **INDJUK DIPILIH DIPOTONG BASIS STANDARD**
 30/90 cm. per metric ton E.f. 210/9/6
24. **BIDJI KAPOK Per Metric Ton.**
 in bulk E.f. 12/2/1
 in bags E.f. 14/5/3
25. **AMPAS TAPIOCA Per Kwintal (Kadar Pati Max. 73%).**
 ampas tapioca DM. 4.50
 tepung ampas tapioca DM. 5.40
26. **GAPLEK Per Kwintal (Ketjuali Lampung).**
 gaplek gelondong DM. 6,-
 tepung gaplek DM. 5,50
27. **TEPUNG TAPIOCA Per Kwintal.**
 kwalita AAA E.f. 1/3/-
 kwalita AA E.f. 1/2/-
 kwalita A E.f. 1/1/-
28. **PINANG Per Kwintal (Bukan PINANG ATJEH).**
 sliced kwalita I DM. 29,-
 kwalita II DM. 23,-

- kwalita III DM. 15
 splits kwalita I DM. 23
 kwalita II DM. 16
 bulat putih DM. 11
 bulat merah DM. 10
29. **HEWAN HIDUP Per Ekor.**
 sapi ex Bali HK\$. 166
 sapi ex Banda Atjeh HK\$. 149
 sapi ex Lombok HK\$. 159
 sapi ex Sumba HK\$. 117
 sapi ex Timor HK\$. 105
 sapi ex Djawa Timur/Surabaja HK\$. 110
 sapi ex Madura HK\$. 85
 kerbau ex Bali HK\$. 149
 kerbau ex Banda Atjeh HK\$. 129
 kerbau ex Sumbawa Besar HK\$. 152
 kerbau ex Lombok, Bima, Sumba, Flores HK\$. 142
 kerbau ex Djawa Timur/Surabaja HK\$. 107
 babi HK\$. 35
30. **GAMBIR Per Kwintal.**
 gambir kembang No. 1 E.f. 19/
 gambir bulat E.f. 16/
 gambir persegi hitam (extrac) E.f. 7/
31. **DJAGUNG Per Metric Ton.**
 kuning/putih US\$. 25,-
 m e r a h US\$. 24,-

Djakarta, 31 Djuli 19

PIMPINAN
BIRO LALU LINTAS DEVIS
DIREKTORIUM
 ttd.
R.A. KARTADJODJENANA
 Ketua

P.T. KAPOK INDONESIA

(PERUSAHAAN NEGARA)

PEMBELI, PENDJUAL DAN EKSPORTIR TUNGGAL UNTUK HASIL
 KAPOK INDONESIA

TURUT SERTA MEMBANTU PEMERINTAH DALAM MEMPERBESAR EKSPOR,
 HASIL BUMI INDONESIA DEMI SUKSESJA REVOLUSI DALAM BIDANG
 PEREKONOMIAN.

Kantor Pusat :

Djl. R. Patah 33, Semarang
 Telp. Sm. 668
 Cable ; PTKAPOK SEMARANG.

Tjabang Djawa Tengah :

Djl. R. Patah 33, Semarang
 Telp. Sm. 649 — 1780
 Cable : KAPOK SEMARANG.

Tjabang Djawa Timur :

Djl. Radjawali 5, Surabaya
 Telp. U. : 3658 — U. 3682
 Cable : KAPOK SURABAJA.

Perwakilan Tegal :

Djl. Diponegoro 34, Tegal
 Telp. 242
 Cable : PERKAPOK TEGAL.

Perwakilan Makasar :

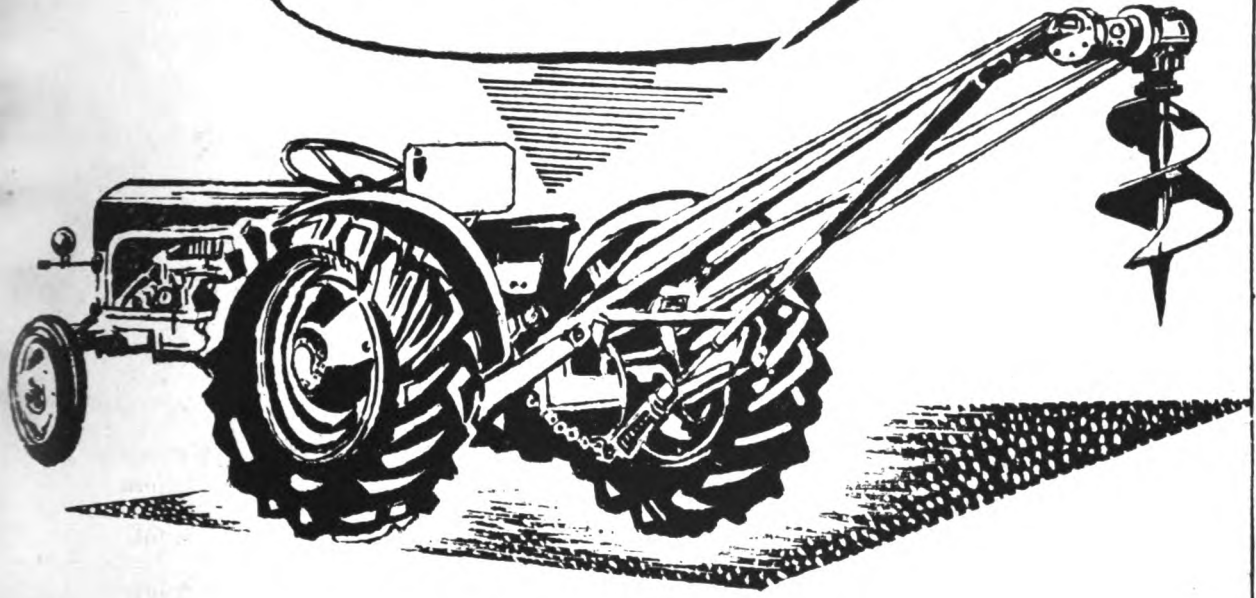
Djl. Kal'mantan 88, Makasar
 Cable : PERKAPOK MAKASAR.

Perwakilan Djakarta :

Djl. Teuku Tjhih Ditiro 46
 Flat 18, Djakarta
 Telp. Menteng 702
 Cable : PERKAPOK DJAKARTA

terima indent

TRAKTOR
GUNA PEREMADJAN
KEBUN-KEBUN
KARET.



MASSEY-FERGUSON

Agen tunggal di Indonesia

PANTJA NIAGA



KRAMAT RAJA 04-06
DJAKARTA

Anda ingin SUKSES dalam Perdagangan ?

Datangilah

P.N. PEMBANGUNAN NIAGA



**Aparat Revolusi dalam
bidang perdagangan :**

IMPOR

EKSPOR

KONTRAKTOR

PROJEK dan INDUSTRI

Untuk suksesnja usaha anda, harap berhubungan dengan :

P.N. PEMBANGUNAN NIAGA

Division² :

- 1. IMPOR BAHAN BANGUNAN**
- 2. IMPOR ALAT² BESAR/MESIN²**
- 3. IMPOR MESIN² SANDANG**

Alamat :

Djl. Hajam Wuruk no. 12
D J A K A R T A

Division² :

- 1. IMPOR SANDANG PANGAN**
- 2. IMPOR BAHAN² CHEMICALIEN/PHARMASI**
- 3. E K S P O R**

Alamat :

Djl. Gajah Mada no. 12
D J A K A R T A

Unit Khusus "KARYA TJOTAS" Djakarta I

WARTA



Perdagangan

AP
W299
P433
18
9



9

TAHUN KE - XVIII

MADJALAH „WARTA PERDAGANGAN”

Terbit tiap 2 Minggu sekali

Diterbitkan oleh :

Departemen Perdagangan Dalam Negeri beserta Urusan Perdagangan Luar Negeri dari Kompartimen Luar Negeri/H.E.L.N dan Perdagangan Luar Negeri.

Pelindung :

J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/
Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri
BRIG. DJENDERAL A. JUSUF.

Penasehat :

1. Pembantu Utama Kuasa Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri
S O E D I R O M A.
2. Pembantu Utama Menteri Perdagangan Dalam Negeri
Prof. Dr. ARIFIN ABDURACHMAN.

Pemimpin Umum :

Kepala Direktorat Marketing dan Research :
Ir. J.J. Pitoy M.A.

Staf Redaksi :

Staf Direktorat Marketing dan Research.

Penanggung Jawab :

Kepala Seksi Publikasi Madjalah
Anwar B. Harahap.

Pembantu, Tetap :

Prof. Ir. Teko Sumodiwirjo — Kolonel Jusuf Ramli — Major A. Rachman Rukmantara — R. Hertatyanto S.H. — Drs. Waskito — Dr. J. Panglaykim.

Pembantu Khusus :

Budhiman B.A. — Kolonel Usman Ismail — Alamsjah S.B.P. — R. H. Tuwaidan M.A. — Drs. Sjaaf Muchtar — Major Drs Sukadjat — R. Isa — Drs A. Aidit — Suprpto — Sudjadi — A. Karim Usman S.H. — Dudy Djaya.

Alamat Redaksi dan Tata Usaha :

Madjalah „WARTA PERDAGANGAN”
Direktorat Marketing dan Research
Djalan Tanah Abang Timur No. 87
D J A K A R T A

Pelaksana/Pertjetakan :

Kepala Pertjetakan P.N. Karya Tjotas
Burdi Reksodirdjo.

Pembayaran uang langganan dilakukan dimuka dengan :

1. Penjetoran atas Rekening Madjalah “Warta Perdagangan” Kode No. : KB/W.A.-194, pada Bank Indonesia — Djl. : Thamrin, Djakarta.
2. Dinas Giro dan Tjek Pos atau dengan pos wissel jang langsung dialamatkan kepada Tata Usaha Warta Perdagangan Direktorat Marketing dan Research.

DAFTAR ISI

Halaman.

1. Kata Pengantar Redaksi	1
2. Wedjangan-wedjangan Revolusi (Utjapan-utjapan Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dalam tiap pidato 17 Agustus	2
3. Tanggapan/Reportase pers ibukota mengenai Konperensi pers JM Menteri Perdagangan Brigdjen A. Jusuf pada tgl. 16-8-1965 jang diselenggarakan di Conference-room Deperdag.	5
4. Tjara perdagangan dan penggunaan SPP.	8
5. Unit pelaksana dan pedoman pelaksanaan ekspor (Kep. WPB I KOTOE No. Kpts. 55/WPB - Kotoe thn 1965)	9
6. Perkembangan dalam bidang prasarana dan pengaruhnja pada proses marketing di Indonesia (Dr. J. Panglaykim).	12
7. Koperasi adalah Wahana kealam sosialisme Indonesia (Amanat PJM Presiden kepada para Ketua Induk Koperasi di Istana Negara mendjelang Munaskop II). ..	17
8. PERKOPERASIAN (Undang-Undang No. 14 thn 1965).	19
9. Variaberita singkat Ekonomi/Perdagangan Internasional.	27
10. Variaberita singkat Ekonomi/Perdagangan Dalam Negeri.	29
11. Pengumuman ² Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri.	31

Keterangan Gambar Kulit muka :

GEDUNG DEPARTEMEN PERDAGANGAN, dalam rangka turut menjambut serta memeriahkan dwi dasawarsa Kemerdekaan R.I.

(Foto : Ipphos).

Surat Izin terbit No. 21A/SK/UPPG/SIT-15 tanggal 17-4-1965.

a Pengantar Redaksi :

Dalam rangka menjambut dan menghidmatkan peringatan dwi dasawarsa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, disadiklanlah dalam nomor ini tjukilan dari Wedjangan-wedjangan Revolusi jang diutjapkan oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi pada tiap-tiap 17 Agustus.

Serangkaian dengan maksud diatas serta untuk menambah bekal bagi kita semua untuk turut ambil bagian dalam penyelesaian revolusi jang semakin meningkat ini, maka bersamaan dengan Warta Perdagangan nomor 9 ini dikeluarkan pula EDISI DWI DASAWARSA jang memuat setjara lengkap pidato TAKARI (Tahun Berdikari) dan adjaran Pemimpin Besar Revolusi dari „Dibawah Bendera Revolusi” jang berdjulul „Mentjapai Indonesia Merdeka”.

Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri Brigdjen A. Jusuf pada tanggal 16 Agustus 1965 j.l. telah mengadakan suatu Konferensi-pers. Dalam konferensi-pers tersebut setelah memberikan pendjelasan setjara umum mengenai reorganisasi jang telah diadakan dalam lingkungan Departemen Perdagangan, beliau mengharapkan agar pegawai negeri pada umumnya dan pegawai Departemen Perdagangan pada khususnya, hendaknya bekerdja dengan pengertian bahwa demi jang 105 djuta rakjat Indonesia tidak ada pengorbanan jang terlalu besar. Seorang pegawai negeri harus dapat berdjombang demi kepentingan masjarakat dengan menanggung segala pengorbanan dan kesengsaraan.

Disamping itu J.M. Menteri Brigdjen A. Jusuf mengemukakan pula lima sifat jang harus dimiliki oleh pegawai negeri; jakni :
dedication terhadap tugasnja; keberanian untuk melaksanakan tugas; kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut; dapat melihat problema setjara djelas dan bertindak untuk mengatasinja serta memiliki "heaven storming revolutionary spirit" jang tak henti-hentinja.

Koperasi adalah Wahana kealam sosialisme Indonesia. Oleh karena itu dalam nomor ini dimuat untuk disadikjan kepada para pembatja Amanat P.J.M. Presiden kepada para Ketua Induk Koperasi di Istana Negara menjongsong Munaskop ke-II.

Presiden mengatakan bahwa tudjuan kita ialah : membuat manusia Indonesia benar-benar insan masjarakat, bukan insan rimba, bukan insan gua jang hidup sendiri didalam gua, tetapi insan masjarakat. Koperasi dalam memetjahkan persoalan-persoalan ekonomi adalah pula tempat persemaian daripada djawa insan masjarakat itu. Sosialisme adalah djawanja koperasi. Selandjutnja dalam amanat tersebut Presiden mendjelaskan bidang bergerak daripada koperasi jang terletak dalam dua lapangan, jakni :
PRODUKSI-KOPERASI dan KOPERASI JANG BERGERAK DILAPANGAN DISTRI-BUSI.

Untuk menjesuaikan kehidupan/gerakan perkoperasian dengan Haluan Negara dan Haluan Pembangunan serta Strategi Dasar Ekonomi Indonesia, pada tanggal 3 Agustus 1965 j.l. telah ditetapkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian. Undang-undang jang baru ini mengatur segala sesuatu jang menjangkut kehidupan kope-rasi jang berintikan pola koperasi dibidang **LANDASAN IDIIL/HALUAN, ORGANI-SASI dan USAHA.** Agar para pembatja dapat menelaahnja lebih mudah, maka undang-undang tersebut kami muatkan setjara lengkap pada nomor ini.

Dalam rangka berdikari, telah dikeluarkan pula Surat Keputusan Bersama Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Perdagangan/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. Kep. 68/UBS/65, untuk menampung lebih landjut tjara perdagangan dan penggu-naan S.P.P.

Untuk mensukseskan Crash Program Ekspor KOTOE maka dengan Keputusan Wk. Panglima Besar I KOTOE No. Kpts. 55/WPB - Kotoe tahun 1965, telah ditetapkan „Unit Pelaksana dalam rangka organisasi Team Crash Program Ekspor dan Pedoman Pelak-sanaan Ekspor.

WEDJANGAN-WEDJANGAN REVOLUSI

(Utjapan-utjapan Presiden/Pemimpin Besar
Revolusi dalam tiap pidato
17 Agustusnja).

Duapuluh tahun usia Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah usia jang sudah dapat dikatakan dewasa. Negara merdeka jang dapat mempertahankan kemerdekaannya sampai seperlima abad adalah negara jang dapat diandalkan untuk berdiri terus selamanya.

Adalah merupakan suatu tradisi dinegara kita, bahwa tiap hari keramat tanggal 17 Agustus, presiden Sukarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi Bangsa Indonesia mengutjapkan amanat keramatnja. Kata² beliau itu akan selalu mendjadi kenyataan sedjarah, mendjadi pegangan serta pedoman bagi seluruh bangsa Indonesia dalam menyelesaikan revolusinja.

Sebagai bekal untuk memperkuat ketahanan mental, kita perlu mengenangkan kembali kata² Pemimpin Besar Revolusi, jang merupakan „benang² merah” dalam tiap pidato 17 Agustusnja sedjak tahun 1945, dalam rangka memperingati usia duapuluh tahun kemerdekaan kita.

— „Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang, untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun! Gelombangnja aksi kita untuk mentjapai kemerdekaan kita itu ada naiknja ada turunnja, tetapi djiwa kita tetap menudju kearah tjita²”.

— Sekarang tibalah saatnja kita benar² mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita didalam tangan kita sendiri. Hanja bangsa jang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnja”.

(Dari Pidato Presiden dalam mengumumkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945).

— „Kita memproklamirkan negara ada gampang, tapi mempertahankan negara, memiliki negara ada sukar, hanja rakjat jang mempunjai rasa penuh tanggung djawab tadi, tidak bosanan, itulah jang mendapat negara jang abadi. Barang siapa ingin mutiara harus berani terdjun dilaut jang dalam. Djangan lembek mohon pada Tuhan supaja bangsa Indonesia mendjadi satu bangsa jang djaja didunia, mendjadi bangsa jang kuat, dan tabah”.

(Dari pidato Presiden dalam memperingati satu tahun kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1946).

— „Gemblengkanlah segala kemauan² individuil mendjadi satu Maha-Kemauan-Bangsa dan Maha-

Kemauan-Bangsa ini harus digembleng lebih kuat daripada penderitaan apapun, daripada bahaya apapun! Dan bilamana Maha-Kemauan ini lebih kuat daripada penderitaan apapun dan bahaya apapun maka ia achirnja akan mematahkan penderitaan apapun dan bahaya apapun.

— „Rawe-rawe rantas malang-malang putung!

— „Mari berdjalan terus! Dengan gigi menggigit mari berdjalan terus!

Tuhan beserta kita!”

(Dari Pidato Presiden 17 Agustus 1947).

— „20 Mei 1908 — disanalah letaknja sumber kesadaran nasional kita. Sumber kesadaran bangsa satu, bertanah air satu. Sumber kesadaran hendak merdeka sebagai bangsa. Sumber kesadaran hendak mendirikan Negara Nasional jang meliputi seluruh Indonesia. Sumber tempat timbulnja tekad hendak berdjjuang mati-matian mematahkan belenggu pendjadjahan asing, walaupun rintangan dan kobanan jang bagaimanapun djuga”.

— „Sungai nasional jang mengalir dari sumber itu, empatpuluh tahun lamanja sudah, mengalir terus Rintangan² jang melintang, hanjut — bukit² jang menghalang, gugur, — tetapi tudjuan jang terach belum tertjapai pula. Karena itu, mengalirlah terutuh Sungai, mengalirlah terus menudju Lautan Merdeka, — terus — meski ada rintangan dan halang bagaimanapun djuga. Patahkanlah semua rintangan itu, dadalkan semua halangan jang mengadang djalanmu. Lautan Indonesia Merdeka pasti nanti tertjapai. Djangan berhenti, sebab dengan mengalir terus menudju Lautan, engkau setia kepada Sumbermu

(Dari pidato Presiden 17 Agustus 1948).

— „Mari kita adakan satu masyarakat jang aman dan makmur, satu masyarakat jang kamu aman dan kamu sedjahtera, seluruh rakjat Indonesia aman dan seluruh rakjat Indonesia sedjahtera, dengan tiada penderitaan, seluruh rakjat Indonesia sedjahtera dengan tiada penderitaan dan tiada kesengsaraan, tiada pemerasan dan tiada kemiskinan, tetapi bertahuilah, bahwa kemerdekaan jang demikian hanja dapat ditjapai dengan usaha jang keluar dan hebatnja semangat elang-radjawali. Mari kita beradakan perdamaian seluruh dunia dan kesedjahteraan seluruh dunia, tetapi usaha itupun mendjadi semangat elang-radjawali”.

— „Hidupkan, hidupkanlah semangat elang-radja-
ali itu, dan kamu sekalian, kita sekalian akan mer-
deka. Merdeka didalam arti jang seluas-luasnja.”
(Dari pidato Presiden 17 Agustus 1949).

— „Ja, belum ada „journey's end” bagi kita —
berjuangan kita djauh belum selesai, pembangunan
menunggu bertimbun-timbun — hai, bangkitlah
kembali bangsaku, njalakanlah kembali dalam djiwa-
mu apa jang kita namakan „Semangat Proklamasi”.

— „Apa jang dinamakan Semangat Proklamasi?
Semangat Proklamasi? Semangat Proklamasi adalah
semangat rela berjuang, berjuang mati-matian de-
ngan penuh idealisme dan dengan mengesampingkan
segala kepentingan diri sendiri. Semangat Proklamasi
adalah semangat persatuan, persatuan jang bulat
mutlak dengan tiada mengetjualikan sesuatu golongan
dan lapisan. Semangat Proklamasi adalah se-
mangat membentuk dan membangun Negara dari
ketiadaan. Ingatkanlah kembali, Saudara²; bahwa
dari ketiadaan kita telah membentuk Negara, — dari
ketiadaan, dari kehiliran — tak lain tak bukan ialah
arena kita ichlas berjuang dan berkorban, karena
kita mutlak bersatu, karena kita tak segan mengu-
rungkan keringat untuk membentuk dan membangun.
Manakala sekarang tampak tanda² kelunturan
dan degenerasi itu, hidupkanlah kembali Semangat
Proklamasi”.

— „Hanja dengan demikianlah kita pantas bernama
Bangsa jang bertradisi Proklamasi, hanja dengan
demikianlah kita tidak harus malu kepada diri sen-
diri manakala kita pada ini hari merajakan
Proklamasi”.

(Dari „Soal Hidup atau Mati” 17 Agustus 1950).

— „Hai bangsa Indonesia, djangan djadi satu
bangsa jang segan akan kerdja. Djangan djadi satu
bangsa jang hanja mau senang² sadja. Djangan me-
ra, bahwa sesuatu bangsa bisa mendjadi bangsa
jang muda, hanja karena ia mentjintai kesenangan
aja. „Een volk wordt niet verjongd doordat men
de aanbidding van het genot leert”, demikian
Mar Mazzini, pemimpin nasional Italia. Sungguh,
manakalah sekali lagi hukum-pasti dari sedjarah itu :
tidak kesenangan zonder kerdja, tiada kemakmuran
der keringat”.

(Dari „Tjapailah : Tata-Tentram-Kerta-Rahardja”
Agustus 1951).

— „Mendjadilah kita satu bangsa jang penuh di-
nik, satu bangsa jang „hijeg rumagang hing gawe”,
satu bangsa jang tidak dengki mendengki satu sama
satu, satu bangsa jang „tebih saking tjetjengilan,
tebih saking laku djati”. Mendjadilah negara kita
negara jang memenuhi segala harapan² kita jang
hidup, dan harapan²nja kawan kita jang telah
hidup. Mendjadilah Rakjat Indonesia Rakjat jang
mujur, sebab ia mengerti dan menindakkan bahwa

kemakmuran hanjalah mendjelma djika dipanggil
dengan panggilanja Gawe”.

(Dari „Harapan dan Kenjataan” 17 Agustus
1952).

— „Hajo bangsa Indonesia, dengan djiwa jang
berseri-seri mari berdjalan terus ! Djangan berhenti,
Revolusimu belum selesai ! Djangan berhenti sebab
siapa jang menentang tjorak-dan arahnja Sedjarah,
tidak perduli ia dari bangsa apapun, ia akan digiling-
digilas oleh Sedjarah itu sama sekali”.

— „Buktikanlah memiliki Djiwa Besar itu, Djiwa
Merdeka itu, Djiwa jang tak segan bekerdja dan
membeli, Djiwa dinamis jang bisa berdiri sendiri
diatas kaki sendiri dari hasil usaha sendiri — bukan
djiwa jang meminta, merintih, mengemis sadja ke-
kanan dan kekiri, sambil bermimpi dapat mentiapai
deradjat penghidupan jang makmur dan seboleh²nja
tidak bekerdja sama sekali”.

(Dari „Djadilah alat Sedjarah” 17 Agustus 1953).

— „Berilah djiwa-ragamu dengan mutlak !
Djangan setengah² ! Jang setengah² tidak akan
mendapat padi segenggam, jang mutlak akan men-
dapat Dunia. Vivekananda pernah berkata, bahwa
sesuatu bangsa jang tenggelam hanjalah dapat diang-
kat oleh orang² jang djiwanja terbuat dari zatnja
petir dan zatnja guntur. Terdjunlah kedalam lautan-
bhakti itu dengan djiwa jang terbuat dari zatnja.
Petir dan Zatnja Guntur !”

(Dari „Berirama dengan Kodrat” 17 Agustus
1954).

— „Sjarat mutlak untuk kelandjutan hidup ialah
Kemauan Hidup — Levenswil, Levensdrang, — dan
sjarat-mutlak untuk kelandjutan hidup sesuatu
bangsa ialah Kemauan Hidup sebagai Bangsa, —
National Levenswil, National Levensdrang. Bangsa
jang tidak mempunjai Api-Hidup-Nasional ini, Api-
Keramat jang menghikmati semua warga-bangsanja,
dari agama apapun, dari lapisan sosial apapun, dari
ethnologi apapun dan dari ideologi — politik apa-
pun, — bangsa jang tidak kalbunia berkobar-kobar
dengan Api-Keramat, „Feu Sacre” ini, bangsa jang
demikian itu lambat laun akan gogrok dan akan
bujar mendjadi „bangsa²” jang ketjil, atau akan
gogrok dan bujar mendjadi kelompok² manusia
belaka, atau akan tenggelam-lenjap-musnah sama
sekali”.

— „Njalakanlah lagi Api-Keramat itu manakala
ia hampir padam, kobarkanlah nialanja manakala
ia masih menjala ! Dengan Api-Keramat Nasional
itu didalam kalbu, mari berdjalan terus ! Dengan
Api-Keramat Nasional itu didalam kalbu, Insja
Allah, kita dapat berdjalan terus !”

(Dari „Tetaplah Terbang Radjawali” 17 Agustus
1955).

— „Siapa mandek akan mati! Roda sedjarah berputar dengan tak mengenal berhenti. Kita Bangsa Indonesia bersama-sama dengan bangsa Asia-Afrika lainnja masih didalam kantjahnja perjuang-an-umum untuk membersihkan dunia ini dari kutu-kutunja kolonialisme. Kita bersama-sama dengan mereka harus mengerahkan seluruh tenaga kita untuk meng-gugurkan singgasana pendjadjahan”.

(Dari „Berilah isi keapda hidupmu” 17 Agustus 1956).

— „Itulah kiprahnja tiap² Revolusi! Tetapi tiap² Revolusi! Tetapi Revolusi djuga barulah benar² Revolusi, kalau ia terus menerus berdjwang. Bukan sadja berdjwang keluar menghadapi musuh, tetapi berdjwang kedalam memerangi dan menundukkan segala segi² negatif jang menghambat djalannja Revolusi itu. Ditindjau dari sudut ini, maka Revolusi adalah satu proses jang dinamis dialektis dan dialektis-dinamis, satu simfoni jang hebat dari kemenangan atas musuh dan kemenangan atas diri sendiri, satu simfoni hebat antara overwinning dan self-overwinning. Hanja bangsa atau kelas jang dapat mengadakan simfoni jang demikian itulah dapat mentjapai kemajuan dan kekuatan dengan djalan Revolusi!

— „Revolusi adalah Gerak, Revolusi adalah Beweëing. Revolusi adalah Gerak Madju meninggalkan Hari Kemarin — Revolution rejects Yesterday”.

— „Djangan takut kepada „persoalan”. Dalam tiap² bangsa jang sedang dalam pertumbuhan dan perpindahan, maka tiap² kemajuan akan menimbulkan persoalan. Siapa takut persoalan, ia sebenarnya konservatif, ia sebenarnya takut inisiatif”.

(Dari „Suatu Tahun Ketentuan” 17 Agustus 1957).

— „Tidak ada sesuatu jang lebih berbahaja dan lebih menjelakakan bagi sesuatu bangsa, daripada duduk nggelenggem-ajem-ajem, enak-enak diatas bantal sambil memakan warisan daripada leluhurnja jang telah mangkat.

Jang membuat sesuatu bangsa bertumbuh dan menjadi besar ialah: usaha, keringat, dinamika, pembantingan-tulang, perjuang-an, aktivita jang kreatif, inventif, dan vital. Bangsa jang duduk termenung — maski leluhurnja adalah gembong² kebesaran dan sedjarah lampajnja adalah gilang gemilang laksana Nur dilangit, — bangsa jang demikian itu akan laju dengan sendirinja, akan menjadi ketjil, akan mengerut, dan achirnja akan mati. Kebesaran dan kebahagiaanmu tidak lagi ditangan leluhurmu jang telah mangkat, kebesaran dan kebahagiaanmu adalah didalam tanganmu sendiri, dan itupun; didalam tanganmu sendiri jang berdjwang, didalam tanganmu jang menjala-njala dengan Apinja Tjipta”.

(Dari „Suatu Tahun Tantangan” 17 Agustus 1958).

— „Kesulitan² kita hanja akan dapat kita atasi dengan keuletan seperti keuletannja orang jang mendaki gunung. Tetapi: Berbahagialah sesuatu bangsa, jang berani menghadapi kenjataan demikian itu! Berani menerima bahwa kesulitan²nja tidak akan lenjap dalam tempo satu malam, dan berani pula menjingkirkan lengan badjunja untuk memetjahkan kesulitan² itu dengan segenap tenaganja sendiri dan segenap ketjerdasannja sendiri. Sebab bangsa jang demikian itu, — bangsa jang berani menghadapi kesulitan² dan mampu memetjahkan kesulitan², — bangsa jang demikian itu akan menjadi bangsa gemblengan. Bangsa jang Besar, Bangsa jang Hanja-krawarti-hambaudenda. Bangsa jang demikian itulah hendaknja Bangsa Indonesia!”

(Dari „Penemuan Kembali Revolusi Kita” 17 Agustus 1959).

— „Tjamkanlah hai Rakjat Indonesia, tjamkan dalam dadamu dan dalam fikiranmu: Suatu Revolusi hanja dapat berlangsung dan berachir setjara baik, djika ada: Satu pimpinan Revolusi jang revolusioner. Satu Ideologi dan Konsepsi Nasional jang revolusioner, djelas, tegas, diperintji. Tanpa itu. Revolusi pasti kandas ditengah djalan. Tanpa itu malah mungkin Revolusi lantak kembali kepada keadaan² sebelum Revolusi!”

(Dari „Djalannja Revolusi Kita” 17 Agustus 1960).

— „Djanganlah puas djika mentjapai sesuatu kemenangan! Tiap kemenangan dalam satu tingkat perjuang-an, hanjalah merupakan satu tambahan modal, satu tambahan alat bagi perjuang-an dalam tingkat jang kemudian”.

— „Pantjasila adalah alat pemersatu! Pantjasila bukan alat pemetjah-belah! Dengan Pantjasila, kita djuga mempersatukan tiga aliran besar jang bernama Nasakom itu. Djadi djangan mempergunakan Pantjasila untuk mengadu-dombakan antara kita dengan kita”.

— „Djangan anti Nasakom! Djangan menderi Nasakom-phobie atau trio-phobie”.

(Dari „Re-So-Pim” 17 Agustus 1961).

— „Ja!, atas dasar Manipol-USDEK dan RESO PIM, maka Revolusi Indonesia sekarang sudah m naik kepada tingkat selfpropelling growth: Kita madju atas dasar kemajuan! Kita mekar atas dasar kemekaran! Kemajuan sudahlah mempunjai momentum sendiri, dan kewajiban kita ialah djangan sekali-kali melepaskan momentum itu.

— „Karena itu, hai Rakjat Indonesia dari Sabana sampai Merauke, djangan lepaskan konsolidasi dan kemajuan ini, djangan meninggalkan dasar dan landasan daripada konsolidasi dan kemajuan jaitu Manipol-USDEK-Resopim, djangan kend

Bersambung ke hal.

KONPERENSI PERS MENTERI BRIGDJEN ACHMAD JUSUF DENGAN PERS IBUKOTA

Mendjelang peringatan Dwidawasara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, maka pada tanggal 16 Agustus 1965, J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri telah mengadakan Konperensi Pers di Conference-room Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri, Tanah Abang Timur 87 Djakarta.

Dibawah ini disadjikan kutipan reportase/tanggapan surat-surat kabar dan LKBN Antara mengenai Konferensi-pers tersebut.

Fungsi perdagangan harus mengamankan Revolusi Chususnja dibidang Ekonomi

Dengan djudul diatas **Harian PELOPOR** menulis antara lain mengenai "mental ambtenar dalam lingkungan Deperdag yang mempunjai peranan penting dalam perekonomian pada saat meningkatnja perjuangan seperti sekarang ini harus banting stir diganti dengan mental perjuangan yang tak anti-hentinja bagi kebahagiaan 105 djuta rakjat Indonesia". Sedang dalam mental perjuangan yang harus dimiliki semua corps pegawai Negeri harus mengabdikan pada masjarakat 24 djam sehari karena kita bukan bekerdja buat madjikan tetapi untuk nusa dan bangsa.

Selanjutnja dikemukakan penandasan yang diberikan oleh Menteri Brigdjen A. Jusuf kepada pers ibukota tersebut yang diharapkan dapat membantu Departemen Perdagangan dalam perjuangannya sebagai alat Revolusi untuk mengamankan Revolusi kita dari rongrongan kaum subversi ekonomi, manipulator, koruptor, kabir dan unsur feodalis.

Dalam hal pengertian **Turba djangan hanja buat show**, demikian **Harian Pelopor**, tapi harus benar-benar diresapkan kedalam djiwa disertai dengan perasaan dedication yang tulus, keberanian, kemampuan, berani bertindak untuk petjahkan setiap problematik, dengan semangat yang tak kundang padam, sehingga kalau setiap Warganegara Indonesia yang 105 djuta mau banting stir dalam 24 jam, imperialis pasti akan terkikis habis.

Berbitjara tentang perdagangan oleh Menteri didjelaskan, bahwa selama \$ (dollar) tidak dikuasai pemerintah maka kaum manipulator tetap akan merongrong dan mempermainkan ekonomi kita, demikian **PELOPOR**.

Selanjutnja mengenai fungsi perdagangan harus dapat mengamankan djalannya revolusi kita khususnya dibidang ekonomi yang selama ini mendapat rongrongan djuga dari unsur-unsur non-economical.

Adil dulu baru makmur, Menteri Brigdjen A. Jusuf mengemukakan bahwa rusaknja perekonomian kita adalah akibat mental pelaksana yang tidak beres terutama dilingkungan P.N.N. yang selama ini mengalami impotent business.

Untuk sampai pada makmur kita harus "turba" dengan djudjur melaksanakan politik Banting stir dalam rangka Berdikari dan melaksanakan Ampera. Agar semua rakjat dapat bergerak tjepat kita tak perlu impor sedan luxe tapi dengan sepeda semua dapat sampai ketempat tudjuan tanpa berjam-djam menunggu pengangkutan yang tak kundjung datang.

Demikian a.l. **Harian PELOPOR**.

Dalam rangka Berdikari dibidang ekonomi devisa harus dikuasai oleh negara.

Dengan djudul tersebut diatas **Harian SULUH INDONESIA** mengemukakan antara lain mengenai **kenaikan harga pada achir-achir ini banjak yang dipengaruhi oleh faktor-faktor non-economical**. Untuk ini yang terpenting ialah kita harus mengkikis habis mental ambtenar, dan dalam hal ini Departemen Perdagangan ingin mendjadi tjontoh dari Departemen-Departemen lainnja. **Harian ini** menulis selanjutnja dan mengemukakan apa yang dikemukakan Menteri jaitu mengapa dan dimana tjatnja bensin, gula dan sebagainya? Bukankah kebanjakan terletak pada mentalita pegawai-pevawai dan pada manipulator/spekulan sehingga harga melambung naik. Dan kemudian mengemukakan adjakan Menteri kepada pers dan masjarakat untuk bersama-sama mengganjang faktor non-economical guna membuat stabilita dibidang ekonomi dan tegasnja kestabilan harga.

Selanjutnja **SULUH INDONESIA** menulis tentang uraian Menteri mengenai aktivita Departemen

menjang dipimpinnja, bahwa sedjak tiga bulan terachir ini telah ditjapai volume ekspor sebesar US\$ 220 djuta dan mengharapkan tahun depan seluruh **pemakaian devisa** lewat P.N.N. Selandjutnja mengenai pentingnja penguasaan dan penggunaan devisa Negara dalam rangka berdikari dibidang ekonomi.

Setudju seluruh devisa dikuasai pemerintah MESKIPUN HUBUNGAN DENGAN SINGAPURA PULIH,

Harian sore **EKONOMI NASIONAL** dengan djudul tersebut diatas memulai uraiannja mengenai tanggapan J.M. Menteri mengenai nota ekonomi DN SOBSI jang ditudjukan kepada Presidium Kabinet Dwikora, bahwa beliau dapat menjetudju isi nota tersebut jang mengusulkan supaya sistim S.P.P. dihapuskan dan seluruh devisa dikuasai Pemerintah. Ditambahkan bahwa tidak dikuasainja seluruh devisa oleh Pemerintah seperti 25% devisa dari S.P.P. jang berada diluar pengawasan Pemerintah, kemungkinan dapat dipergunakan untuk tudjuan-tudjuan manipulasi dan spekulasi, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kestabilan harga-harga.

Mengenai aktivita P.N.N. dengan djudul **P.N.N. mulai melakukan aktivitasnja**, **EKONOMI NASIONAL** memberitakan bahwa selama l.k. 2 bulan setelah reorganisasi, telah mulai dengan kegiatannja, dan telah mentjapai hasil-hasil jang baik. Hasil-hasil jang telah ditjapai selama l.k. 2 bulan terachir antara lain tampak dibidang kegiatan ekspor, dimana dari US\$ 220 djuta nilai ekspor jang ditjapai hingga achir Djuli 1965, 10% dihasilkan oleh ekspor jang dilakukan oleh P.N.N.

Selandjutnja diberitakan mengenai langkah-langkah jang telah diambil Deperda dibidang organisasi dan personalia dalam rangka mempertinggi efisiensi sehingga Deperda benar-benar dapat mengabdikan diri kepada masyarakat.

Mengenai **hubungan perekonomian dengan Singapura** antara lain diberitakan oleh **EKONOMI NASIONAL**, bahwa meskipun hubungan kita dengan negara tersebut sudah pulih kembali, namun kita tidak akan mendjadikan negara tersebut sebagai pelabuhan enterpot seperti dulu. Prinsip Berdikari akan terus mengembangkan hasil-hasil jang telah kita peroleh selama konfrontasi. Keterangan tersebut, demikian Menteri, dimaksudkan pula sebagai djawaban terhadap sementara orang sudah mulai berpikir dengan menghendaki adanja hubungan-hubungan barter dan perdagangan konsinjasi dengan Singapura.

1966 Seluruh pemakaian Devisa Negara Melalui P.N.N.

SINAR HARAPAN dalam pemberitaannja mengenai konferensi pers tersebut, pada awal pemberitaannja menulis mengenai reorganisasi dalam Departemen Perdagangan dan harapan Menteri mengenai Perusahaan² Niaga Negara Gaja Baru dalam Tahun 1965 ini djuga akan dapat memberikan keuntungan kepada Negara. Selama ini Perusahaan² Negara selalu menderita kerugian karena adanya mismanagement didalamnja dimana P.N.² tersebut didjadikan merupakan "tools" untuk tjaja keuntungan pribadi dan kelompok-kelompok sadja. Untuk tahun 1966 jang akan datang diharapkan seluruh pemakaian devisa negara akan melalui P.N.N., sedang untuk tahun 1965 dari semua target impor jang berdjumlah US\$ 200 djuta dipegang dan dilaksanakan oleh P.N.N.

Tjopotnja Singapura tidak merobah tekad Berdikari 1966 Impor diatur P.N.N.

Demikian djudul Harian **BERITA YUDHA**. Diberitakan mengenai tjopotnja Singapura dari Malaysia sehubungan dengan perdagangan, bahwa kita tidak perlu kembali kepada sedjarah lama. Mengutip perkataan Menteri, **BERITA YUDHA** menulis, "Apa jang telah kita tjapai, kita teruskan dan perkembangkan dan kita akan tetap berdikari". Memang ada beberapa pedagang-pedagang jang mulai memimpikan masa-masa lalu sewaktu Singapura mendjadi entrepot dengan tjara-tjara jang lain seperti barter, konsinjasi dan lain-lainnja. Tetapi menurut Brigdjen Jusuf hal itu adalah chajal laka.

Selandjutnja mengenai **open talk** dan **open management** Harian itu dalam beritanya menulis "untuk menanggulangi perekonomian sehingga bermanfaat bagi rakjat, menurut Menteri, kita harus mendjadi pembina perdagangan jang menguntungkan masyarakat." Djangan hanja tertarik oleh motif profit sadja, tapi djuga narus melihat dari segi idilinja. Untuk ini diharapkan oleh Menteri Brigdjen A. Jusuf, bantuan masyarakat untuk membantu Pemerintah dengan laporan dan kontrol.

Mengenai pelaksanaan impor, dengan djudul **Impor 1966 diatur P.N.N** ditulis bahwa "demi perdagangan berdjuaug untuk kepentingan Negara kini oleh Deperdag sedang diadakan persiapan untuk tahun 1966 dimana pelaksanaan impor seluruhnja akan diatur oleh P.N.N." Kegiatan P.N.N. belakangan ini menundjukkan mendjadi leading position.

Seterusnja mengenai kenaikan harga ini dalam pemberitaannja, **BERITA YUDHA** menulis "Dan bila masyarakat tahu bahwa hal itu memang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan unsur-unsur Deperdag/P.N.N. laporkan, tapi bila hal itu terdjadi oleh perbuatan manipulator-manipulator didalam pendistribusian, exposelah soal itu biar masyarakat mengetahuinja. Dan untuk ini dimintanja a

media massa, koran-koran, bersikap jang tepat dan djangan hanja memberitakan jang bersifat insi-
uasi, atau djuga dengan demonstrasi-demonstrasian”.

Kemudian mengenai peringatan keras J.M. Menteri kepada usahawan-usahawan jang tidak me-
penuhi peraturan-peraturan, misalnja dengan penundaan pembukaan L/C. Untuk ini mulai Sep-
tember 1965 akan ditetapkan pembukaan L/C itu paling lambat selama 25 hari. Dan bila ternjata da-
lam hal ini, unsur-unsur Deperdag/PNN² jang menjebabkan kelambatan, Menteri akan mengambila
langkah tegas seperlunja.

Demikian antara lain Harian **BERITA YUDHA**.

Kita Tidak Gunakan lagi Singapura sebagai Pelabuhan Entrepot.

Demikian djudul pemberitaan **L.K.B.N. ANTARA** dalam buletinnja. ANTARA memulai dengan
berita mengenai penjelaskan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan
Luar Negeri Brigdjen A. Jusuf mengenai Departemen Perdagangan gaja baru kini telah menjapai
konsolidasi terutama dibidang personalia dan disamping itu telah mereorganisasi struktur lama jang
tidak sesuai lagi dengan tuntutan revolusi. Untuk melaksanakan tugasnja itu dibutuhkan tjukup
waktu guna mereorganisasi seluruh aparat perdagangan, karena banjak kesulitan-kesulitan jang di-
hadapi. Mengenai djumlah pegawai, Menteri mengatakan, bahwa djumlahnja kini telah diperketijl
guna menjapai efisiensi kerdja jang lebih besar dan daripada pegawai-pegawai jang bekerdja di
Departemen Perdagangan diminta agar mereka tidak lagi memiliki mental ambtenaar, tetapi me-
gabdi demi kepentingan nusa dan bangsa. Guna menjapai tudjuan itu telah diadakan perbaikian
bidang sosial dan ditijptakan iklim kerdja jang baik.

Mengenai **P.N.N. memiliki leading position** ditulis lebih landjut oleh ANTARA, bahwa Perusaha-
an Niaga Negara kini sudah berobah sifatnja dan sudah sesuai dengan tudjuan revolusi, walaupun ma-
h terdapat kelemahan-kelemahan, tetapi lambatlaun kelemahan-kelemahan itu akan dikikis habis.
Karena Perusahaan Niaga Negara adalah milik kita bersama, maka P.N.N. harus melakukan open
management. Dibidang impor P.N.N. sudah mempunjai leading position dan tahun 1965 ini akan diada-
kan persiapan-persiapan agar dalam tahun 1966 seluruh impor dapat dilakukan oleh P.N.N.

Selanjutnja mengenai fungsi sosial daripada Departemen ditulis oleh ANTARA, bahwa Deperdag
dengan tegas dan aktif harus mengkikis habis unsur-unsur negatif jang merugikan perdagangan.
Dalam hal ini social-control merupakan sjarat mutlak untuk menstabilisir dan memperbaiki keadaan
pawasa ini dimana harga-harga kian hari kian meningkat. Tugas utama jang kita harus lakukan se-
arang ini ialah menjapai stabilita harga. Guna menjapai stabilita harga itu diperlukan flow of
goods setjara teratur dan kontinu, karena itu perlu sekali impor dikuasai oleh Perusahaan Niaga
Negara.

Kemudian dikemukakan oleh ANTARA mengenai pendapat Menteri A. Jusuf mengenai Singa-
pura jang mengatakan, bahwa apabila Pemerintah Indonesia mengakui Singapura, tetapi dibidang
perdagangan kita tidak akan lagi menggunakan Singapura sebagai pelabuhan entrepot seperti da-
lam hal ini, karena kita tetap akan melaksanakan berdikari dibidang ekonomi.

Pada akhir pemberitaannja ANTARA menulis penjelaskan J.M. Menteri Perdagangan Dalam Ne-
geri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri, bahwa terlalu banjak wewenang jang diberikan ke-
pada pedjabat-pedjabat tertentu dapat menimbulkan kesempatan untuk manipulasi dan korupsi dan
manipulasi-manipulasi jang menimbulkan kenaikan-kenaikan harga, karena terlalu banjak matarantai
jang harus dilalui sebelum barang-barang sampai ketangan konsumen. Demikian ANTARA.

Perdagangan dengan Singapura harus kita lumpuhkan.

Harian **BERITA REPUBLIK** mengenai Konperensi Pers tersebut, memberitakan khusus perda-
ngan Indonesia dengan Singapura berhubung dengan tjopotnja dari apa jang dinamakan "Malaysia".
Menteri Brigdjen A. Jusuf menjelaskan, bahwa politik berdikari jang sedang kita djalankan
merupakan pukulan jang paling hebat bagi perekonomian Nekolim, terutama negara apa jang di-
namakan Malaysia.

Selanjutnja tentang tanggapan Menteri mengenai situasi perdagangan dengan Singapura se-
h keluaranja dari ikatan "Malaysia" ditulis "bahwa hakiki perdagangan dengan Singapura itu ti-
dah dapat diterima begitu sadja, karena hal itu berakibat djajanja kembali Singapura seperti se-
kala. Dunia sekarang sedang memperhatikan kita, dan dunia djuga sekarang sedang memperhati-
kan sikap Indonesia terhadap Singapura, baik mengenai konfrontasinja maupun dengan politik luar
negerinja. Oleh sebab itu, demikian Brigdjen A. Jusuf, bahwa dengan adanja landasan 5 adjimat
revolusi kita, dimana diantaranya terdapat politik Berdikari, maka perdagangan dengan Singapura
tidak perlu, bahkan merugikan pihak Indonesia telah tjukup terkenal di luar negeri, dan Peru-
sahaan Niaga Negara kini telah menundukkan peranan jang positif dalam membina dan memba-
n perekonomian Indonesia."

Demikian antara lain Harian **BERITA REPUBLIK**.

Tjara Perdagangan dan Penggunaan S.P.P.

Surat Keputusan Bersama

Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Perdagangan/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri
No. Kep. 68/UBS/65.—

MENTERI URUSAN BANK SENTRAL DAN MENTERI PERDAGANGAN/KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

- Menimbang** : Dalam rangka "Berdikari" dianggap perlu untuk menampung lebih lanjut tjara perdagangan dan penggunaan S.P.P.
- Memperhatikan** : Kep. 23 — 24/UBS/64 tanggal 22 April 1964, No. Kep. 35/UBS/65 tanggal 10 Mei 1965 dan No. Kep. 57/UBS/65 tgl. 12/7/65.
- Mengingat** : Peraturan Presiden R.I. No. 13 Tahun 1964 pasal 4.

MEMUTUSKAN :

- Pasal 1** : Produsen² jang tidak/atau belum mempunyai angka pengenalan sebagai importir dapat melaksanakan impor barang² jang diperlukan untuk unit-nja melalui Perusahaan² Niaga Negara, jang ditundjuk oleh Menteri Perdagangan/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri.
- Pasal 2** : Sehubungan dengan pasal 1 diatas, maka disamping Produsen Importir seperti jang telah ditetapkan dalam S.K.M. No. 57/UBS/65, Perusahaan Niaga Negara jang ditundjuk oleh Menteri Perdagangan/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri dapat pula membeli S.P.P. di Bursa untuk keperluan² sebagai dimaksudkan dalam pasal 1 diatas.
- Pasal 3** : Ketentuan² jang ditetapkan dalam S.K.B. No. Kep. 57/UBS/65 tanggal 12 Djuli 1965 dan S.K.B. ini diperlakukan terhadap Ekspor jang pormulir² E3-nja dibarengi "Fiat Muat" oleh Bea dan Tjukai pada tanggal 12 Djuli 1965 dan atau sesudahnya.
- Pasal 4** : Peraturan² lain mengenai S.P.P. sekedar tidak bertentangan dengan peraturan ini, tetap berlaku.

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Surat Keputusan Bersama ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.—

MENTERI PERDAGANGAN/KUASA MENTERI
URUSAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

t.t.d.

ACHMAD JUSUF

Brig. Djen. TNI

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 7 Agustus 1965

MENTERI URUSAN BANK SENTRAL

t.t.d.

JUSUF MUDA DALAM.—

"Unit Pelaksana"

D A N

Pedoman Pelaksanaan Ekspor

(Keputusan Wakil Panglima Besar I Komando Tertinggi Operasi Ekonomi
No. Kpts. 55/WPB-KOTOE Tahun 1965)

**KAMI, WAKIL PANGLIMA BESAR I
KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI,**

menimbang :

bahwa untuk mensukseskan Crash Program Ekspor Komando Tertinggi Operasi Ekonomi perlu ditetapkan tjara-tjara baru untuk memperlantjar pengapalan, barang-barang ekspor yang telah load-ready;

bahwa untuk kelantjaran flow of goods dalam bidang realisasi ekspor, perlu ditempuh langkah-langkah yang tjepat dan praktis dengan mengjumpangkan segala yang berbau birokrasi.

meningat :

Keputusan Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 35/KOTOE Tahun 1965 tertanggal 14 Djuni 1965;

Keputusan Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 36/KOTOE Tahun 1965 tertanggal 14 Djuni 1965.

memperhatikan :

Hasil rapat-rapat Team Crash Program Ekspor Komando Tertinggi Operasi Ekonomi. :

M E M U T U S K A N :

PERTAMA :

Menginstruksikan Team Ekspor Daerah untuk membentuk "Unit Pelaksana" diwilajahnja masing-masing dengan tugas memperlantjar/mengcrashkan flow of export goods dari barang-barang dipelabuhan-pelabuhan yang sudah load ready baik di mainports maupun di outports.

Organisasi "UNIT PELAKSANA" tersebut terdiri dari :

- a. Port Authority sebagai Ketua merangkap Anggauta.
- b. Bea dan Tjukai setempat, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggauta.
- c. BIPALINDO sebagai Anggauta.
- d. B.L.L.D.-Bank Devisa sebagai Anggauta.
- e. D.E.K. sebagai Anggauta.
- f. G.P.E.I.S. sebagai Anggauta.

g. Kepala Perburuhan setempat sebagai Anggauta.

h. Komandan Keamanan setempat sebagai Anggauta.

K E D U A :

Menginstruksikan kepada :

1. KESOP III
2. Kantor Besar Direktorat Bea & Tjukai
3. BIPALINDO/BAPELUMA

atas dasar rentjana pelaksanaan Operasi Crash Program Ekspor yang disusun dibawah ini, mengeluarkan **PERINTAH OPERASI** kepada instansi-instansi dibawahnja, dengan mempergunakan semua alat-alat yang ada dalam wewenangnja.

K E T I G A :

PEDOMAN PELAKSANAAN EKSPOR

I. DI MAINPORTS :

A. Kantor Bea & Tjukai di pelabuhan mainports mengamankan Crash Program Ekspor.

Dalam pemetjahan soal-soal yang khusus /luarbiasa harus diminta keputusan dari "UNIT PELAKSANA" yang bertanggung-djawabkan kepada **TEAM EKSPOR DAERAH**.

Pelaksanaan hal-hal tersebut, Bea dan Tjukai harus berpedoman kepada Instruksi Team Crash Program Ekspor KOTOE No. 06/TEP-KOTOE/1965.

B. BIPALINDO PUSAT menerima data dari BIPALINDO DAERAH menjeluruh mempunyai gambaran dari semua pelabuhan-pelabuhan dimana sudah tertampung bahan-bahan yang sudah "load ready".

1. Data yang dimaksud diatas BIPALINDO DAERAH mendasarkan atas permintaan pembukaan ruangan kapal oleh Eksportir.
2. BIPALINDO PUSAT membuat rentjana operasi barang-barang yang sudah load ready berdasarkan fakta-

fakta jang diterima dari BIPALINDO DAERAH dengan tjara sebagai berikut :

- a. BIPALINDO PUSAT membuat daftar izin space-allotment berdasarkan data-data jang diberikan oleh BIPALINDO DAERAH.
- b. Meneruskan pendjatahan ruang kapal (space allotment) kepada BIPALINDO DAERAH.
- c. Mengeluarkan instruksi pelaksanaan pemuatan dari barang-barang jang telah dibukukan kepada BIPALINDO DAERAH.
- d. BIPALINDO PUSAT mengisi pelabuhan-pelabuhan jang telah ditentukan dengan mendirigir kapal-kapal ke daerah jaitu :
 - Kapal-kapal P.N. Djakarta Lloyd.
 - Kapal-kapal Perusahaan Pelajaran Samudra Nasional.
 - Kapal-kapal liners Asing.
 - Kapal-kapal trampers Asing.
 - Kapal-kapal Asing jang di-charter oleh eksportir dan di-ageni Perusahaan Pelajaran Nasional.
- e. Selanjutnja ekspor jang telah dikapalkan ditudjukan langsung ke negara tudjuan sesuai jang tertjantum dalam S.I.P.

C. KOMANDAN PORT AUTHORITY

Dalam rangka Crash Program Ekspor tiap Komandan Port Authority sebagai Ketua "UNIT PELAKSANA" dengan segala unsur didalam wewenangnja di-wadajibkan untuk memberikan bantuan sepenuhnya.

1. Komandan Port Authority di-wadajibkan untuk menghususkan cargo dan ships handling dalam rangka Crash Program Ekspor.
2. Ketua UNIT PELAKSANA mulai memberikan bantuan sepenuhnya setelah mendapat pemberitahuan akan adanja kegiatan ekspor dari BIPALINDO c.q. Perusahaan Pelajaran jang ditugaskan untuk pengangkutan barang ekspor tersebut.
3. Komandan Port Authority setempat menjediakan sekurang-kurangnja 50% dari ruang gudang di pelabuhan untuk kebutuhan ekspor.

II. DI OUTPORTS

A. TJARA PELAKSANAAN DARI OUT-PORTS TERDIRI DARI TIGA TJARA:

1. Mempergunakan kapal-kapal inter-insuler (P.N. PELNI, Perusahaan Pelajaran Pantai, Armada Semut) dengan transshipment di Indonesian ports.
 - a. Dalam hal ini kapal-kapal tersebut dipergunakan sebagai first carrier.
 - b. BAPELUMA harus memberikan djasa-djasa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Menerima permintaan ruang kapal dari Eksportir.
 - 2) BAPELUMA setempat c.q. P.N. PELNI atau Perusahaan Pelajaran pantai setempat membukukan muatan untuk diangkut oleh kapal-kapal interinsuler ke pelabuhan-pelabuhan tranship didalam negeri.
 - 3) Doorvoer-documenten diselenggarakan oleh P.N. DJAKARTA LLOYD setempat.
 - 4) Atas dasar data-data tentang barang-barang load ready jang diterima dari BAPELUMA DAERAH, BAPELUMA PUSAT harus mengisi pelabuhan-pelabuhan outports dengan kapal-kapal jang dibutuhkan oleh first carrier.
 - 5) Di pelabuhan-pelabuhan tranship BAPELUMA harus menampung barang-barang ekspor jang harus diangkut oleh second carrier untuk mainports. BAPELUMA c.q. P.N. PELNI atau Perusahaan Pelajaran Pantai harus menghubungkan BIPALINDO di mainports.
 - 6) Penjerahan barang ekspor ke pada second carrier diusahakan di kade ekspor.
 - 7) Pada pemuatan di mainports ke second-carrier, perusahaan Perkapalan jang mengeluarkan doorvoe-konosemen (through bill of lading) bertanggung djawab atas kelantaran pemuatan ke second-carrier kapal jang tertjantum dalam through bill of lading tersebut.
 - 8) Kelandjutan muatan dilakukan oleh BIPALINDO menurut prosedur jang telah ditentukan lebih dahulu dalam angka I.
2. Dengan transshipment di Bangkok dan Sihanoukville oleh Maskapai Pelajaran Asing tertentu jang telah diizinkan oleh Pemerintah (dan pelabuhan-pelabuhan tranship lainnja

luar negeri jang mungkin akan ditentukan lebih landjut oleh Pemerintah), berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tugas operasi ini dilakukan oleh BIPALINDO.
- b. **Outports terdiri dari pelabuhan-pelabuhan jang dapat disinggahi oleh :**
 - 1) Hanja kapal-kapal berukuran 500 ton kebawah.
Untuk pelabuhan-pelabuhan jang hanja dapat disinggahi oleh kapal-kapal ketjil BIPALINDO mengeluarkan vaart-orders kepada kapal-kapal asing jang berukuran ketjil untuk hanja mengangkut barang-barang dari pelabuhan-pelabuhan tertentu misalnja Pontianak, Bandjarmasin, Djambi dan pelabuhan-pelabuhan lainnja jang tidak dapat dimasuki kapal kapal besar.
 - 2) Dimana keadaan memungkinkan pelabuhan-pelabuhan outport jang hanja dapat disinggahi oleh kapal-kapal dibawah 500 ton dapat djuga dikirim oleh BIPALINDO satu atau beberapa trampers asing dan mengadakan pemuatan barang langsung dari pelabuhan-pelabuhan tersebut dengan tjara ship to ship.
 - 3) Pelabuhan-pelabuhan jang dapat disinggahi kapal-kapal jang berukuran diatas 500 ton. Untuk pelabuhan-pelabuhan outports jang dapat disinggahi oleh kapal-kapal besar, BIPALINDO harus mengisi pelabuhan-pelabuhan tersebut dengan kapal-kapal dari Perusahaan Samudra Nasional dan/ atau kapal-kapal asing, liners maupun trampers. Prosedur pembukuan dan pengapalan oleh BIPALINDO dilakukan dengan tjara jang sama sebagaimana telah ditentukan dalam angka I.B. 2(a) s/d d(e) (dalam hal MAINPORTS).
3. Dengan mempergunakan kapal-kapal trampers asing (dan khusus untuk pelabuhan jang hanja dapat disinggahi kapal-kapal dibawah 500 ton dengan tjara ship to ship) langsung ke negara tudjuan sebagaimana tertjantum dalam S.I.P.

B. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN MENGENAI CRASH PROGRAM EKSPOR DI OUTPORTS.

1. **Tugas Bea & Tjukai di Outports.**
Tugas Bea & Tjukai di outports dalam rangka Crash Program Ekspor adalah sama dengan apa jang telah diuraikan dalam angka I.A. (di Mainports).
2. **BIPALINDO.**
Tugasnja telah diterangkan diatas dalam angka II. A.2 dan seterusnya.
3. **KOMANDAN PORT AUTHORITY.**
 - Komandan Port Authority bertindak sebagai Ketua merangkap Anggauta dari UNIT PELAKSANA jang dibentuk oleh Team Ekspor Daerah seperti tersebut dalam dictum PERTAMA angka 2.
 - Tugas dan wewenang Komandan Port Authority di pelabuhan OUTPORTS dalam rangka Crash Program Ekspor adalah sama dengan apa jang tersebut angka I. C dan seterusnya.

III. EKSPOR BARANG CHUSUS.

- a. Dalam bidang ini termasuk ekspor : ternak, kaju, fodder, ikan dan lain-lain soft products.
- b. Untuk kepentingan ekspor ini diperlukan kapal-kapal khusus, jang dewasa ini djumlah kapal-kapalnja masih sangat kurang.
- c. BIPALINDO harus mengusahakan realisasi rentjana penambahan kapal dengan tjara mencharter atau "hire purchase".
- d. Dalam pelaksanaan angkutan laut dari barang-barang khusus terutama fodder dan lain-lain soft products agar supaja dilantjarkan pelaksanaan "operasi overflow". Sesuai dengan Keputusan Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 36/KOTOE Tahun 1965, dictum PERTAMA angka 2, maka "Operasi overflow" dari Departemen Perhubungan Laut bersama-sama dengan Departemen Perdagangan Luar Negeri/ G.P.E.I.S. / BIPALINDO / DJAKARTA LLOYD menurut rentjana jang telah ditetapkan pada tanggal 12 Mei 1965, diintegrasikan kedalam UNIT PELAKSANA dari Team Crash Program Ekspor Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.

Bersambung ke hal. 28.

PERKEMBANGAN DALAM BIDANG PRASARANA DAN PENGARUHNYA PADA PROSES MARKETING DI INDONESIA

oleh :

Dr J. Panglaykim

„Dalam merencanakan dan melaksanakan Pembangunan itu, hendaknya lebih daripada yang sudah-sudah ditunjukkan perhatian dan kekuatan untuk menyelesaikan terlebih dahulu PROJEK-PROJEK PRASARANA (Projek-projek infrastruktur). karena djustru prasarana itulah harus lebih dahulu ada sebelum kita dapat melaksanakan projek yang kita kehendaki. Kurang perhatian terhadap kepada projek-projek prasarana menunjukkan tidak adanya *penglihatan kedepan*. Kurang memperhatikan prasarana, sama dengan membangun *tanpa rentjana*”.

(P.J.M. Presiden Soekarno/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. dalam Amanat beliau pada pembukaan Sidang Umum M.P.R.S. ke-III tanggal 11 April 1965).

1. Perhatian karangan ini akan diarahkan pada aspek perkembangan prasarana dan pengaruhnya pada perkembangan marketing Indonesia.

Tema karangan ini adalah bahwa prasarana dalam kenyataan merupakan salah satu unsur yang turut menentukan „bargaining position” para produsen ketjil (para petani). Tidak adanya atau kurang adanya perkembangan dalam bidang prasarana akan setjara langsung atau tidak langsung memperkuat kedudukan para pelaksana fungsi marketing (seperti berbagai matjam/variasi tengkulak dsb.). Penulis berpendapat bahwa perkembangan dalam sektor prasarana menentukan sekali bagi para produsen ketjil yang tersebar di seluruh Indonesia; prasarana merupakan salah satu aspek penting daripada Revolusi Indonesia.

2. Terlebih dahulu ingin kami menerangkan apakah yang kami artikan dengan prasarana. Dalam bahasa asing prasarana dikenal sebagai: **”Social overhead capital”** atau **”infra-structure”**.

Setjara singkat ini berarti perkembangan dalam sektor (1) pengangkutan, (2) komunikasi, (3) irrigasi dan (4) tenaga listrik.

Empat sektor ini seringkali dalam literatur dilukiskan sebagai syarat² mutlak apabila suatu negara hendak memperkembangkan perekonomiannya. Karena karangan ini akan membahas masalah prasarana dalam hubungannya dengan proses marketing, maka kami akan uraikan lebih lanjut apakah yang kami maksudkan.

Tiap² daerah dengan bantuan Pusat harus dapat memperkembangkan: (1) suatu djaring djalan² (wegennet) yang memadai, (2) suatu djaring lembaga² keuangan (seperti Bank², lembaga² pembiayaan lain), (3) suatu assortimen perusahaan² ketjil yang dapat memberikan djasa² kepada para produsen ketjil dalam bentuk bahan² mentah, barang² kebutuhan² sehari-harinya, (4) tersedianja alat² pengangkut umum

(public transportation) yang bertugas mengangkut barang² kebutuhan² para produsen ketjil serta menangkat hasil² pertanian rakjat ke pusat² pengumpulan, (5) tersedianja alat² komunikasi yang baik antara daerah produsen dan sentra² perdagangan/industri dsb., disertai adanya alat² komunikasi lain seperti alat² informasi pasar, harian², madjalah, dsb., dan (6) lembaga² lain yang memberikan bantuan² kepada produsen dalam bentuk asistensi tehnik.

3. Setelah diperintji apakah yang kami artikan dengan prasarana dilihat dari sudut marketing, maka kami akan berusaha menerangkan setjara singkat apakah yang kami artikan dengan marketing.

Marketing pada umumnya dapat dilihat dari berbagai sudut. Pertama, dapat kita melihat marketing dari sudut pandangan serba-pranata (institutional approach). Serba-pranata melihat proses marketing dari sudut, dengan tjara bagaimanakah berbagai pranata (institutions) menjusun diri dan mempertahankan diri dalam suatu tata-ekonomi. Apakah yang diartikan dengan menjusun diri dalam suatu tata-ekonomi? Dewasa ini sebahagian dari marketing Indonesia dan pranata² atau lembaga² yang melaksanakan masih dikoordinir dan dikontrol oleh mekanisme harga dan pasar. Akan tetapi disamping elemen koordinasi dan kontrol yang dilakukan melalui mekanisme pasar dan harga, kita djuga harus memperhatikan adanya faktor² lain yang turut mempengaruhi kontrol serta mengkoordinir proses marketing Indonesia jaitu: (1) peraturan² pemerintah, management yang dengan mengintrodusir berbagai matjam tehnik management dan organisasi, dan dengan demikian ikut mempengaruhi pembentukan suatu pranata, dan (3) kebiasaan² adat istiadat dalam masyarakat.

Kekuatan yang bertanggung djawab akan mekanisme harga dan pasar, seringkali menimbulkan suatu tjara marketing sebagai akibat suatu perubahan dalam perimbangan kekuatan. Pembelian² se-

besar-besaran, dengan harga yang lebih rendah daripada pembelian dalam jumlah kecil telah mengakibatkan penggabungan daripada perusahaan² kecil. Gejala ini dapat kita lihat dalam bidang perindustrian menengah/kecil, dimana sektor perdagangan besar (whole-saler) memegang peranan dalam memasukan bahan² mentah dan penyaluran² hasil² industri tersebut. Adanya berbagai macam sistem ident adalah akibat daripada adanya mekanisme pasar dan harga, yang mentjerminkan suatu peningkatan kekuatan.

Peraturan² pemerintah dapat juga mengakibatkan berbagai macam perubahan pokok dalam pranata marketing. Khusus pranata perusahaan dagang negara (sekarang perusahaan niaga negara) adalah satu contoh daripada perubahan yang telah ditjapai oleh undang-undang No. 19/1960. Lebih lanjut kita juga melihat usaha² yang pokok dalam bidang operasi dan usaha² melaksanakan apa yang dikenal sebagai „trade reform”. „Trade Reform” pada pokoknya hendak mengadakan perubahan dalam pranata marketing Indonesia, karena dengan tegas² dikatakan, bahwa sektor Negara lah yang memegang kedudukan komando, sedangkan sektor² operasi dan swasta merupakan sektor yang „subordinate” kepada sektor negara, membawahi sektor negara. Sehingga dengan peraturan² pemerintah kita dapat menyusun suatu pranata yang dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah. Pengalaman terakhir memberikan pelajaran kepada kita bahwa ini tidak selalu mungkin, karena mengadakan perubahan² secara drastis tanpa mengadakan penjelidikan yang seksama dan perhitungan akan konsekwensi²nya, dapat merugikan jalannya roda perekonomian Indonesia.

Teknik² management dapat mengakibatkan perubahan dalam suatu pranata marketing. Melaksanakan teknik management dalam bidang penerangan/invertensi/sales promotion dapat memperkecil perdiaan barang² yang tidak dapat terjual. Diluar negeri misalnja, teknik² ini dilaksanakan dengan baik di Soviet Russia. Dengan adanya media ini, maka hasil² pabrik yang memproduksi suatu barang dapat menyesuaikan diri dengan selera para konsumen. Teknik² management pula dapat menghilangkan rantai² yang mempertinggi harga penjualan. Misalnja rantai pedagang besar dapat dilampaui dan pabrik² yang progresif dalam kebijaksanaannya dapat menjual hasil²nya setjara langsung kepada rantai yang paling dekat pada konsumen. Di Djepang dapat kita melihat bahwa setjara tradisional kebanyakan akan bahan² mentah diimpor melalui pedagang besar (dikenal sebagai suppliers, yaitu Mitsui, Fuyo, dan sebagainya, dsb.), dan penjualan² hasil² pabrik juga dilakukan melalui mereka. Ini dimungkinkan antara lain oleh kebiasaan² dari tahun ke tahun, serta peningkatan atas penjatuan produksi melalui kredit². Mereka dapat memberikan kredit kepada satuan² produksi karena mempunyai hubungan langsung. Terkadang juga pedagang² besar tersebut mengontrol lembaga² keuangan².

Pandangan putjuk pimpinan dapat juga mengadakan perubahan dalam tjara tradisional marketing di Djepang.

Misalnja pada dewasa ini perusahaan Sony berusaha untuk setjara langsung menghubungi konsumen melalui rantai² yang paling dekat sama konsumen terakhir. Ini berarti bahwa mereka harus mempunyai suatu „backing” keuangan yang kuat sekali, karena penyaluran kepada rantai retail akan membutuhkan keuangan dalam rangka pemberian kredit.

Dari tjontoh² diatas kita dapat melihat bahwa kebiasaan dalam marketing untuk menjual suatu barang melalui kredit telah mengekang rantai² yang menerimanya. Tidak mengherankan, bahwa dimasa sebelum Perang Dunia Kedua pabrik² yang mempunyai nama baik, yang tidak dapat membayar kembali kredit yang diberikan oleh perusahaan dagang besar, telah diambil over oleh perusahaan dagang besar itu. Pula kebiasaan memindjam pada rantai/para pengumpul hasil² pertanian dsb. dari produsen kecil (para petani) telah melemahkan bargaining position para produsen kecil. Khusus dalam bidang pertanian rakjat kita melihat bahwa para pedagang perantara sedjak berpuluh-puluh tahun menguasai para produsen kecil melalui pemberian kredit dalam bentuk tunai dan barang² keperluan para produsen kecil.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa serba-pranata melihat adanya kekuatan² njata yang menyebabkan perubahan dalam pranata marketing. Kekuatan² yang dapat menggenerir perubahan dalam pranata marketing Indonesia adalah sebagai berikut: (1) Mekanisme harga dan pasar, (2) Peraturan-peraturan Pemerintah, (3) Teknik² Management dan Organisasi dan (4) Kebiasaan², adat istiadat. Yang dipentingkan dalam serba-pranata adalah perubahan² yang dapat ditimbulkan oleh kekuatan² tersebut dalam rangka mendorong barang² dari titik produsen ke titik konsumen, atau dengan lain perkataan dalam rangka menjadikan sandang-pangan-djasa kepada konsumen Indonesia kearah tingkat yang lebih efisien dan efektif. Disamping pandangan serba-pranata, marketing dapat juga dilihat dari sudut fungsi² dalam proses marketing. Tentang jumlah fungsi terdapat banjak sekali pendapat. Ada yang mengatakan bahwa fungsi² marketing dapat digolongkan kedalam sembilan kategori, ada pula yang berpendapat bahwa ini harus diperintji lebih lanjut sampai katakan saja 20 atau lebih. Yang kami akan adjukan adalah klasifikasi yang pada umumnya sudah diterima oleh sebagian terbesar dari ahli marketing modern.

4. Pertama : fungsi penukaran (exchange), yang dapat diperintji dalam fungsi (a) Pembelian dan (b) penjualan.

Kadang² juga kedua fungsi ini disatukan dalam istilah „merchandising”. Pada pokoknya fungsi „merchandising” melakukan planning/strategi suatu perusahaan/organisasi.

Kedua : fungsi lain adalah „physical movement“, jaitu jang melaksanakan barang² jang disalurkan, dapat disampaikan kepada konsumen² jang membutuhkannya seperti pengangkutan dan pergudangan.

Ketiga : fungsi jang dikenal sebagai „facilitating“ seperti pembiayaan, grading/standardisasi, komunikasi, asuransi, pengambilan risiko.

Adanja fungsi² marketing ini pada pokoknja berarti bahwa pembagian kerdja dalam marketing dapat dilakukan atas dasar pembagian fungsi² ini. Ada sektor dalam marketing jang menspesialisir diri dalam djual beli, ada jang memperhatikan pengangkutan, brokerage, asuransi dan sebagainya. Kemudian dalam spesialisasi kita melihat perkembangan dalam sektor pembiayaan (finance). Fungsi ini dalam praktek memegang peranan jang penting sekali. Bilamana kita melihat tugas² berbagai bank dan lembaga keuangan lainnja, maka dapat diselami betapa besar kontrol dan penguasaan mereka atas kesatuan jang beroperasi dalam sektor marketing. Lihat misalnja tjontoh di Djepang dimana lembaga² keuangan Djepang dengan „big ten“nja menguasai bagian terbesar daripada perindustrian, perdagangan dalam dan luar negeri. Di negara kita, lembaga² keuangan jang bekerdja dalam lingkungan „organized money market“ merupakan salah satu lembaga jang mengontrol bidang² marketing lainnja. Karena kredit dari „organized money market“ merupakan kredit jang relatif murah dibandingkan dengan bunga jang diminta dari „unorganized money market“, maka pressure/tekanan² untuk memperolehnja kuat sekali. Umumnja mereka jang sudah mempunyai sejumlah uang jang berasal dari „unorganized money market“, dalam kenyataan lebih mudah memperoleh kredit dari lembaga² organized money market“.

Dengan demikian dapat diobservir adanja sematjam „kerdja-sama“ antara „organized“ dan „unorganized money market“ dalam bentuk penyaluran kredit dari lembaga keuangan, seperti bank² swasta, bank² negara dan sebagainya. „Kerdjasama“ ini sebetulnja tidak dikehendaki, akan tetapi karena sistim pemberian kredit adalah demikian, bahwa jang mempunyai modal akan dapat menarik kredit dari bank²/lembaga² keuangan lain, maka fungsi financiering dibidang marketing Indonesia dalam kenja-taannya sungguh² mengekang sektor produsen ketjil, para industriawan menengah dan ketjil.

Pandangan serba-fungsi menggambarkan kepada kita marketing jang dalam usaha²nja mendorong/mengarahkan barang/djasa² dari produsen ke konsumen melalui fungsi² jang baru kita lukiskan.

Fungsi² ini pada pokoknja harus dilakukan oleh petugas/organisasi/kesatuan² jang menspesialisir diri dalam berbagai fungsi ini, akan tetapi halnja berlainan di marketing Indonesia pada umumnya, dan chususnja marketing daripada hasil² pertanian. Sebelum kita membahas ini lebih landjut, mari kita terlebih dahulu mempelajari pandangan serba-barang, jang seringkali tidak diperhatikan oleh para peladjar dalam marketing.

5. **Pandangan serba-barang** (commodity approach) penting sekali, chusus dalam hubungan dengan hasil² perkebunan dan hasil pertanian rakjat. Kita harus mengetahui setjara mendalam : apakah jang mendjadi sifat² tertentu daripada hasil pertanian rakjat kita? Gambir merupakan salah satu produk jang terpenting untuk membuat djintan di Djepang. Bilamana barang² ini (jang dahulu diimpor melalu Singapura) tidak dapat diimpor maka pabrik² Djintan di Djepang harus menjetop produksinja atau mentjari substitutnja. Demikian pula dengan Pala. Indonesia merupakan satu-satunja produsen pala di dunia. Ini berarti bahwa dalam supply pala, kita mempunyai kedudukan monopoli. Pala adalah bahan pokok untuk pembuatan „mosterd“. Dengan kedudukan demikian kita dapat mendjalankan suatu marketing policy jang lebih menguntungkan bagi kita. Hal demikian telah terdjadi dengan lada hitam. Kita telah berhasil mendjual lada dari US\$ 0,48/49. Dus selama limabelas tahun kita telah mendjual lada dengan harga jang 50% lebih rendah daripada pasar dunia. Kita dapat perhitungkan betapa besar rugi jang diderita oleh Negara dalam ekspor lada. Lebih² pula bilamana kita perhatikan bahwa kita termasuk produsen terbesar daripada lada hitam.

Belum lagi kita perhatikan penggunaan hasil pertanian di negara² industri dan sebagainya. Apakah di negara industri sudah ada usaha² pembuatan substitusi?

Pada prinsipnja kita harus mengadakan penjelidikan jang lebih mendalam tentang sifat² tiap² hasil pertanian kita. Pengetahuan tentang kekuatan/kelemahan hasil pertanian/perkebunan kita di pasar Internasional, merupakan bahan² pokok untuk „foreign trade policy“ kita. Chusus ini penting dalam rangka pengetrapan dalam persetujuan dagang jang kita akan dan sudah laksanakan dengan berbagai negara sahabat. Kita harus mengetahui bahwa bila kita mendjual karet ke salah satu negara jang belum mempunyai industri jang dapat mengolah karet ini maka karet ini oleh negara tersebut akan didjual lagi dalam pasar dunia sebagai raw-material. Dengan demikian negara sahabat itu akan datang dipasar sebagai konkuren kita. Ini baru satu aspek. Jang lebih penting adalah lagi djumlah karet jang diminta. Walaupun negara² jang mengimpor karet kita tidak mempunyai industri jang dapat mengolahnja, akan tetapi bilamana quantum jang diimpor djauh lebih tinggi daripada kapasitas industrinja sendiri, maka kita dapat memperhitungkan bahwa mereka bermaksud mendjual karet itu dipasar dunia. Kadang dengan kesalahan² jang baru kita lukiskan, dan adanya agreement² jang tidak difikirkan terlebih dahulu dengan lebih mendalam kita pada pokoknja telah memberikan subsidi/bantuan kepada perkembangan perekonomian negara² tersebut. Sedangkan kita sendiri membutuhkan devisa untuk membiayai proses pembangunan ekonomi sendiri.

Dari uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa betapa pentingnja untuk memperhatikan pa

dangan serba-barang. Ia merupakan data yang penting sekali dalam penetrapan „foreign trade policy” kita.

6. Marketing Indonesia dalam kenyataannya harus kita teropong daripada ketiga pandangan, yaitu pandangan serba-pranata, serba-fungsi dan serba-barang. Dalam serba-pranata kita akan memperhatikan bagaimanakah perkembangan daripada berbagai pranata (institutions) dalam menjusun diri di proses marketing di Indonesia. Dan djuga dengan tjara bagaimanakah pranata² itu disusun oleh kekuatan diluar mekanisme pasar dan harga, seperti peraturan² pemerintah, tehnik² management/organisasi dan kebiasaan²/adat istiadat. Dari serba-fungsi kita akan mengetahui sampai berapa djauh berbagai fungsi yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga² (agencies) telah mengadakan pembagian kerdja, dan apakah masih ada lembaga/pranata yang masih menguasai lebih daripada satu fungsi, dan apakah setjara relatif pengaruh daripada fungsi² itu. Kita sudah melihat betapa kuatnja unorganized money market mengontrol/menguasai sektor produsen pertanian ketjil. Dengan pengetahuan yang mendalam daripada pandangan serba-barang, kita dapat menetapkan suatu kebijaksanaan dalam perdagangan luar negeri serta penetrapannya dalam berbagai persetudjuan dagang.

7. Setelah kita menerangkan apakah diartikan dengan prasarana dalam marketing Indonesia, serta diuraikan tentang tiga matjam pandangan (approaches) dalam marketing, maka kita ingin menghubungkannja dengan kedudukan para produsen ketjil.

Adalah kenyataan bahwa dewasa ini „marketing” bagi para produsen ketjil (petani² yang berdjumlah jutaan keluarga) dikuasai oleh para pedagang perantara besar/menengah dan ketjil, chususnja hal ini tampak pada petani yang menanam „commercial crops” seperti karet rakjat, gambir, kaju manis, katjang dan sebagainya. Antara produsen ketjil dan pasar dunia terdapat banjak sekali rantai², dan umumnja ini dikuasai oleh berbagai matjam tengkulak. Berbagai matjam tindakan telah diambil untuk menghapuskan rantai² yang dianggap tidak perlu dilihat dari sudut proses marketing. Kita sangat menjetudjui untuk menghapuskan rantai² dari produsen ketjil ke pasar dunia, akan tetapi sebelum kita dapat mengambil tindakan² setjara efektif, terlebih dahulu kita harus mentjiptakan pra-kondisi² yang memungkinkan tindakan itu berhasil.

Pertama kita harus perhatikan bahwa pedagang perantara dan pada chususnja berbagai matjam tengkulak, dalam prakteknja „memborong” fungsi² berikut : (1) Mendjual, (2) membeli, (3) pengangkutan, (4) pergudangan, (5) standardisasi, (sortasi, sb.). (6) Pembiayaan (financiering), (7) pengambilan siko, (8) Komunikasi. Sudah merupakan pengetahuan umum bahwa berbagai matjam tengkulak (pedagang perantara) mensupply hampir semua kebutuhan para produsen ketjil dalam bentuk kredit

(uang tunai), bahan² kebutuhan sehari-hari, alat². Dan supply ini diatur sedemikian rupa sehingga ini dilaksanakan setjara kontinu dan pada waktu² tertentu. Ini berarti bahwa setjara kontinu dan teratur pula mereka membeli/mendjual hasil² pertanian rakjat tersebut. Kemudian mengumpulkan hasil produsen ketjil itu dari 10 kilo sampai 100 kilo dan seterusnya sehingga mendjadi djumlah yang ekonomis „verantwoord” untuk diangkut.

Pengangkutan bahan² kebutuhan produsen ketjil dan hasil² pertanian produsen ketjil diakukan dengan kendaraan (mobil, motorboat, tjikar, truk dan sebagainya) yang mereka miliki sendiri, sehingga mereka dapat mengatur waktunja sendiri dan tempat yang mereka akan datangi. Semua ini berarti bahwa mereka mengambil berbagai matjam risiko, dan ini semua ditanggung oleh mereka sendiri, karena tidak ada perusahaan asuransi yang dapat mengambil oper risiko dalam bidang pengumpulan hasil pertanian rakjat. Bilamana ini dapat dilakukan oleh maskapai asuransi itu, maka preminja adalah sedemikian tinggi, hingga tidak ada manfaatnja. Hasil² pertanian yang diangkut dari desa terpencil dan dalam djumlah yang ketjil² itu, oleh mereka dikumpulkan dan disortir. Setelah itu dibungkus menurut kebiasaan yang diminta oleh pasar dunia, dan mereka teruskan ini kepada para pedagang besar di kota² (pelabuhan). Dan para pedagang besar inilah yang kemudian memasarkan hasil pertanian ini ke pasar dunia.

Dari keterangan diatas dapat kita menarik kesimpulan bahwa berbagai matjam tengkulak (pedagang perantara) memborong semua fungsi marketing ini karena mereka ingin mendjamin kontinuita serta teraturnja supply. Tentu para petani menginginkan, agar ada pengangkutan umum yang dapat mengambil alih sebagian tugas dari para tengkulak itu, akan tetapi menurut keterangan sampai pada saat ini keadaan itu belumlah terwujud. Maka dapat dikatakan, bahwa di daerah² dimana produsen ketjil itu melakukan tugas²nja, prasarana belum berkembang dan para petani berada dalam posisi lemah terhadap para tengkulak.

Karena belum berkembangnja prasarana itu maka berbagai matjam pedagang perantara (tengkulak) itu mendjalankan pemborongan fungsi² marketing setjara menguntungkan. Ini disebabkan, karena produsen ketjil itu tergantung pada kedatangan para pedagang perantara untuk mendjual hasil²nja setjara kontinu dan teratur. Pendjualan serta pengangkutan setjara teratur selanjutnja memberikan kepada mereka kemungkinan memperoleh uang tunai, bahan² kebutuhan sehari-hari seperti sabun, tekstil, korek api, minjak tanah, rokok, peniti dst. Djuga mereka dapat mengharapkan supply akan berbagai alat² yang dibutuhkan dalam melakukan tugas²nja di sektor pertanian.

Para pedagang perantara yang dapat diharapkan akan datang setjara kontinu dan teratur-dalam banjak hal merupakan satu²nja „outlet” akan hasil² pertanian, serta pensupply (pelanggan) akan kebutuhan²

mereka sehari-hari. Dalam praktek mereka bertindak sebagai bankir, pemegang toko² pertanian rakjat ke kota² besar, dst., dan para pedagang itu adalah pula pemikul (pengambil) risiko daripada fluktuasi dalam harga dan risiko² lain seperti pemberian uang djasa, kehilangan² dalam pengangkutan dan seterusnya.

„Pemborongan” fungsi marketing oleh para tengkulak (pedagang perantara) itu tidak akan menguntungkan lagi bagi mereka, bilamana sudah terdapat perkembangan dalam prasarana.

Apabila dalam suatu daerah, dimana produsen ketjil melaksanakan tugas²nja dalam bidang pertanian rakjat, terdapat suatu djaringan-djalan jang baik, maka lambat laun akan terdapat usaha² dan timbul kekuatan kearah pembagian kerdja. Dengan adanya pengangkutan umum jang baik dan teratur, efisien dan kontinu, mungkin sekali akan timbul inisiatif dari segolongan pengusaha diluar desa atau dari lingkungan desa itu untuk membuka toko² ketjil. Mungkin pengusaha² ini dapat mengadakan persetujuan dengan para pedagang perantara agar tengkulak tidak lagi setjara langsung menyalurkan barang² ini pada petani, akan tetapi menjualnja melalui mereka. Mungkin mereka dapat bepergian ke kota untuk membeli kebutuhan² toko²nja dan ini dimungkinkan karena sudah ada pengangkutan umum jang efisien dan teratur.

Toko² ketjil ini jang dapat mensupply kebutuhan para produsen ketjil akan memberikan semangat kepada para produsen ketjil, dan mereka tidak lagi akan tergantung pada supply bahan mentah dan barang konsumsi sehari-hari. Maka mereka mungkin dapat digabungkan atau menggabungkan diri dalam suatu koperasi untuk mensortir barang²nja dan meneruskan ini dalam djumlah jang lebih besar serta grading jang lebih baik ke kota² besar. Akan tetapi sebelum penggabungan² dalam koperasi dapat diselenggarakan, adanya bank²/lembaga keuangan lain merupakan pra-syarat.

Bukan bank² jang memberikan kredit dengan tjara jang konvensional jaitu dengan meminta berbagai matjam djaminan (collateral) sebelum kredit dapat diberikan kepada produsen ketjil atau gabungan daripada para produsen ketjil itu. Adalah penting sekali bahwa lembaga² keuangan ini (bank² desa, bank² koperasi dst.) dapat memberikan djasanja jang minimum sama dengan fasilita jang sampai saat ini diberikan oleh tengkulak² tersebut. Bilamana fasilita² kredit ini tidak dapat diberikan dengan syarat² jang sama, maka usaha untuk menjaingi para tengkulak dan untuk melemahkan kedudukannja dalam lingkungan produsen ketjil tidak akan berhasil. Dus syarat jang utama dan pokok adalah pemberian kredit dan fasilita jang paling sedikitnja sama. Akan lebih baik lagi bila fasilita itu lebih menguntungkan bagi para petani rakjat itu. Maka disini letaknja tugas Bank Berdjuaug.

Tugas Bank Berdjuaug adalah berat sekali. Karena Bank Berdjuaug disamping harus bertindak sebagai

finansir djuga harus bertindak sebagai seorang pedagang jang harus menolong dan melepaskan para produsen ketjil dari kekangan para tengkulak. Mungkin dalam fase² pertama kita akan mengalami kesukaran dalam arti bahwa sedjumlah uang kredit jang diberikan kepada produsen/atau gabungan produsen ketjil tidak akan dikembalikan, akan tetapi bilamana kita dapat mendjamin bahwa hasil² pertanian dapat diterima, maka setjara keseluruhan kerugian jang mungkin akan diderita sebagai akibat daripada djumlah jang tidak dapat dibayar kembali oleh para produsen ketjil, akan hapus. Mungkin Bank Berdjuaug akan menderita dalam suatu daerah akan tetapi ini dapat dikompensir oleh daerah lain dimana pemberian kredit itu lebih berhasil. Sehingga dilihat dari sudut keseluruhan usaha, ia akan menggambarkan suatu surplus. Bukan sadja ini berarti suatu surplus dalam bentuk rupiah, akan tetapi djuga suatu kemenangan moril.

Bank Berdjuaug jang telah berhasil untuk setjara berangsur dan efektif melepaskan para produsen ketjil dari kekangan para tengkulak jang mendjamin dalam berbagai bentuk, telah mentjatat suatu kemenangan dalam perdjuaugannja untuk masjarakat jang adil dan makmur.

8. Dari uraian diatas dapat kita menarik kesimpulan betapa vitalnja perkembangan dalam sektor prasarana. Belum kita meneropong pengaruh daripada adanya komunikasi jang lebih sempurna dalam arti telekomunikasi (kawat, telpon), pos (surat menjurat), pemberian informasi pasar dan sebagainya kepada perkembangan daerah produsen ketjil.

Kita telah mengatakan bahwa berbagai matjan peraturan pada masa jang lampau nampaknja kurang berhasil/tidak berhasil karena pada esensinja kita belum merombak struktur marketing Indonesia khususnja dalam lingkungan produsen ketju itu setjara fundamental. Perombakan setjara fundamental seperti kami katakan, pertama-tama harus dimulai dengan perkembangan dalam sektor prasarana. Berkembangnja sektor prasarana akan mempengaruhi jang besar sekali atas kedudukan para tengkulak (pedagang perantara). Karena belum berkembangnja prasarana, maka mereka „memborong” semua fungsi² marketing, sehingga ini merupakan suatu sistim penguasaan produsen ketjil. Untuk melemahkan kedudukan mereka, harus terdapat suatu pembagian daripada fungsi marketing jang mereka monopoli dewasa ini. Dan pembagian kerdja ini harus dapat **dipaksakan dengan efektif** bilamana setjara sungguh² diadakan perkembangan dalam prasarana didaerah produsen ketjil.

Dari uraian diatas mudah-mudahan kami telah menggambarkan betapa vitalnja prasarana sebagai alat pendjebol jang efektif terhadap kekuatan para tengkulak jang masih mengekang produsen² ketjil jang berdjumlah djutaan itu, serta memberikan faham untuk studi lebih landjut.

Djakarta, 4 Agustus 196

KOPERASI ADALAH WAHANA KEALAM SOSIALISME INDONESIA

Amanat P.J.M. Presiden kepada para Ketua/Induk Koperasi di Istana Negara menjongsong Munaskop II.

Bidang atau wilayah koperasi, terutama sekali, adalah wilayah ekonomi. Tetapi bukan hanya wilayah ekonomi tok. Wilayah koperasi, dan ini barangkali lebih penting, adalah wilayah pensosialatu, kerdjasama antara kita dengan kita. Koperasi, organisasi² koperasi, adalah tempat pesemaian daripada rasa kesosialan ini, rasa kemasjarakatan, rasa bahwa manusia tidak berdiri sendiri, lepas daripada manusia-manusia lain, tetapi adalah satu unsur didalam satu keseluruhan.

Sebagai jang saja sebutkan didalam risalah saja „Mentjapai Indonesia Merdeka”, jang hari-hari ini saja melihat tjukilan-tjukilan daripada tulisan „Mentjapai Indonesia Merdeka” itu, terambil daripada „Dibawah Pendera Revolusi”, di-muat di surat-surat kabar; maka saja katakan di-situ, bahwa tudjuan kita ialah: membuat manusia Indonesia ini benar-benar insan masjarakat. Bukan insan rimba, bukan insan gua jang hidup sendiri didalam gua, tetapi insan masjarakat.

Koperasi dalam memetjahkan persoalan-persoalan ekonomi adalah pula tempat pesemaian daripada djiwa insan masjarakat itu. Republik Indonesia, atau lebih tegas lagi, Revolusi Indonesia menudju, ketjuali kepada kerangka pertama: satu Negara Republik Indonesia jang berwilayah kekuasaan dari Sabang sampai Mrauke, djuga menudju kepada Sosialisme Inonesia. Dan djiwa daripada sosialisme adalah kooperasi. Dunia sosialisme adalah dunia kooperasi. Masjarakat sosialisme adalah masjarakat kooperasi. Maka saja minta kepada Saudara-saudara sekalian, nanti didalam Munaskop jang kedua ini, arahkan semua kehidupan koperasi itu kearah, apa jang saja namakan itu, kemasjarakatan, keinsanan masjarakat.

Sosialisme adalah, kataku, djiwanja kooperasi. Kalau saja boleh memakai perkataan Bakunin, ialah seorang pendekar sosialis, tetapi dari haluan anarchisme — kita tidak setuju kepada Anarchisme — tetapi Bakunin mengatakan satu hal, yaitu bahwa (bahasa asingnja) „de dampkring van het socialisme is de dampkring van de solidariteit”. Artinya: Djiwa sosialisme adalah udara djiwanja solidaritet, dan solidaritet itu adalah keinsanan masjarakat. Solidair antara satu manusia dengan manusia jang lain.

Nah, kita menudju kepada masjarakat jang demikian ini. Dan oleh karena koperasi adalah terutama sekali bergerak dibidang ekonomi dan sebagai kukatakan tadi, pesemaian daripada keinsanan masjarakat: maka koperasi adalah satu alat jang penting sekali untuk mendjadi, kata orang Jawa kuno „wahono”. Sanskritnja „Wahana”

atau „bahana”. Bahasa asing Belandanja „voertuig”, bahasa asing Inggerisnja adalah „vehicle” — cooperative is a vehicle to socialism. Koperasi adalah „een voertuig naar het socialisme”. Koperasi adalah wahana, wahono menudju kepada sosialisme. Wahono itu — voertuig, vehicle. Karena itu saja ulangi perkataanku, koperasi adalah penting sekali. Maka kami, dari Pimpinan Republik Indonesia, mengharap daripada Saudara-saudara, Pemimpin-pemimpin, pengurus-pengurus daripada koperasi ini, betul-betul memberikan sumbangan jang sehebat-hebatnja kepada pelaksanaan daripada kerangka kedua daripada Revolusi kita, yakni satu masjarakat jang adil dan makmur. Oleh karena koperasi adalah wahana, bahana, voertuig, vehicle kealam sosialisme itu.

Mentjapai alam sosialisme. Saudara-saudara, sebagai sudah saja terangkan di Bogor satu minggu atau sepuluh hari jang lalu, mentjapainja itu harus berdjalan revolusioner. Oleh karena sosialisme **an sich** adalah hasil daripada tindakan revolusioner. Sosialisme adalah pengganti daripada susunan individualistis - kapitalisme, Saudara mengerti, individualistis-kapitalisme ini harus kita djebol, kataku, kita ganti dengan susunan baru jang bernama sosialisme. Dus pekerdjaan membina sosialisme ini tidak bisa berdjalan setjara konvensional menurut aturan-aturan ekonomi, terutama sekali tidak bisa menurut aturan-aturan ekonomi-liberal. Oleh karena ekonomi-liberal sendiri adalah anak daripada sistim jang hendak kita djebol. **De liberale economie is een kind van het kapitalisme**. Kalau kita harus mendjebol kapitalisme kita harus mendjebol djuga ekonomi liberal. Dus oleh karena ini adalah satu pendjebolan, kita harus bertindak dan tidak boleh tidak bersifat revolusioner. Wong didjebol, tadi Saudara Achadi-pun telah mensitir utjapan jang saja utjapkan didalam TAVIP, bahwa „tidak ada satu kelas jang mau melepaskan kedudukannja jang berlebih dengan setjara sukarela”. Itu citaat dari Marx: **Geen klasse heeft ooit vrijwillig afstand ged van haar bevoorrechte positie**. Karena tidak **vrijwillig**, ja itulah jang dinamakan djebol, itulah jang dinamakan revolusioner.

Nah, ini, djalan untuk mendedjar atau menjelenggarakan sosialisme: dus menjelenggarakan keinsanan masjarakat, itu Saudara-saudara, sebagai kukatakan didalam pidato di Bogor tempo hari, tidak lurus dan tidak bisa lurus; perdjjoangan mendirikan sosialisme adalah berlaku setjara zigzag, kataku di Bogor.

Saja sitirkan pada waktu pidato di Bogor itu utjapan daripada beberapa pemimpin jang terke-

nal. Seorang berkata, jaitu Lenin, ia berkata, bahwa „de weg naar socialisme, de revolutie weg is niet glad en recht als het Uisky prospekt” — Uisky Prospekt itu adalah djalan besar di Leningrad, lebar-lurus tidak mengkol-mengkol — Padahal djalan ke socialisme adalah zigzag. Utjapan jang saja sitir lagi di Bogor, jaitu utjapan Jean Jaurés, jang oleh karena dia orang Paris, mengamb l tjontoh djalan di Paris. Tentu diantara Saudara itu ada jang pernah ngelujur di Paris, disana itu ada djalan jang lurus besar, namanja **Boulevard Champs-Élysées**. Dia berkata, bahwa **de revolutionaire weg** tidak rata tidak litjin tidak lurus seperti Boulevard Champs Elysées. Itu semuanya skedar ilustrasi daribada pokok p'kiran bahwa perdjalan ke socialisme adalah zigzag Sering banting setir.

Nah ini, kepada Saudara-saudara saja beri tahu, sebagaimana djuga beberapa hari jang lalu saja telah umumkan di Bogor, bahwa dilapangan ekonomipun Republik Indonesia ini akan banting setir. Dilapangan politik sudah beberapa kali banting setir. Dari demokrasi-parlementer tempo hari itu saja banting setir, saja djadikan demokrasi terpimpin. Hubungan kita dengan luar negeri, terutama sekali dengan negeri Belanda jang dulu adalah hubungan jang bermusuhan sekali, sekarang saja banting setir. Pembantingan setir itu dilapangan ekonomi, sebagai kukatakan di Bogor beberapa hari jang lalu, akan saja djalakan insja-Allah tahun muka. Tahun muka kita akan melarang import oleh swasta. Semua import - Negara, semua import - Pemerintah. Swasta akan didjadiankan hanya unsur-unsur produsen-eksportir, export-producent. Itu berarti bahwa nanti koperasipun harus banting setir. Koperasi harus bergerak nanti hanya diatas dua lapangan :

Pertama. produksi-koperasi mengekspor, dan ekspor inipun jang dibawah pimpinan Pemerintah; ekonomi terpimpin sebagai unsur keempat daripada USDEK, Undang-undang Dasar 45 Socialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian). Ekspor inipun terpimpin. Djadi koperasi nanti, sebagian didjadiankan produksi-koperasi jang mengekspornja pun dibawah pimpinan Pemerintah.

Kedua. koperasi bergerak dilapangan distribusi. Distribusi dalam negeri, dibawah pimpinan Pemerintah pula.

Ini pembantingan setir jang akan dikerdjakan oleh Pemerintah, insja-Allah tahun depan. Dan sebagai saja katakan di Bogor, nanti bulan Agustus Departemen Research National akan mengadakan eksposisi, pameran dari semua hasil-hasil research. Maka nanti saja persilahkan pentol-pentol koperasi melihat pameran ini. Nah, sebab diantara hasil-hasil research ini banjak sekali jang nanti bisa didjadiankan bidang, padang, wilayah daripada produksi dan ekspor.

Di Bogor saja beri tjontoh, misalnja juice, kita bikin sawo juice. Belum ada diluar negeri, sawo juice, juice dari sawo. Saja sendiri sudah tjoba, beberapa kali di dapur saja sendiri disini, dan enaknja bukan main! Dan sudah pernah saja kasih minum orang asing, jang berkata: „Presiden, kalau ini diekspor kenegeri kami, akan laku hebat”.

Air tebu, gula tebu, airnja, sap tebu. Hanja dimana jang sudah ada itu, di Manila apa?! Itu kalau di-ekspor akan djuga laku sekali. Demikian pula saja bilang sama kaum wanita, kita bisa mem-produksi bedak, kita bisa memproduksi minjak harum. Sebab Indonesia adalah negeri bunga, kenapa kok wanita kalau beli minjak harus selalu dari Paris, Channel atau Dior. Padahal disini ini negeri bunga. Sampai-sampai, saja berkata, kulit katjang! Saja melihat sendiri di Djepang, kulit katjang goreng itu bukan dibuang, tapi didjadiankan bahan untuk membuat hardboard, didjual keluar negeri. Di Djepang sampai-sampai laron, ja, jang saja waktu ketjil saja sering makan laron begitu enaknja, diekspor. Digoreng, dimasukkan kedalam kaleng, diekspor.

Nah, kalau Saudara-saudara pentol-pentol koperasi sudah melihat pameran national research ini, lha, Saudara bisa pilih, koperasi saja mau mengekspor ini, membikin ini, sawo juice. Koperasi saja mau membikin parfum, koperasi saja mau membikin bedak, koperasi saja mau membikin hardboard, koperasi saja mau membikin barang² lain bisa di-ekspor. Alangkah baiknja kalau bisa begitu, Saudara-saudara. Dan lantas produksi daripada barang-barang ini didjalkan setjara kooperatif. Di Bogor saja berkata kepada Saudara-saudara swasta, swasta nanti boleh hidup hanya sebagai produsen-eksportir. Sekarang saja berkata kepada koperasi, koperasi pun saja minta nanti mendjadi produksi-koperasi-eksportir.

Dus dari sekarang Saudara Achadi sudah mulai mendidik atau bekerdja agar supaya koperasi ini, kalau masih ada impor-koperasi, di-switch agar supaya nanti tahun muka semua koperasi mendjadi produksi-koperasi-eksportir, atau ja distribusi-koperasi, jang dinamakan konsumsi-koperasi itu.

Ini. Saudara-saudara, adalah satu pembantingan setir daripada ekonomi kita. Pembantingan setir jang ketjil-ketjilan. Saudara-saudara boleh pilih sendiri nanti koperasi Saudara itu akan mendjadi eksportir produsen ana. Banjak sekali. Impor didjalkan hanya oleh Pemerintah, dan Pemerintah akan mengimpor hanya bahan-bahan jang tidak bisa dibikin di Indonesia.

Kalau Pemerintah menjetop impor daripada minjak harum misalnja, dengan sendirinja nanti dalam negeri itu memproduksi minjak harum. Kalau Pemerintah menjetop impor daripada kain sutera dengan sendirinja sutera-industri jang sekarang ini sedang kita bangun akan berkembang biak. Kalau

Bersambung ke hal. 4

Perkoperasian

UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1965

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMENIMBANG :

1. Bahwa perkembangan ketata-negeraan semendjak Dekrit Presiden tanggal 5 Djuli 1959 menuntut adanya perubahan fungsi segala lembaga kemasyarakatan chususnya koperasi untuk diintegrasikan dengan dasar serta tudjuan Revolusi Indonesia ;

2. Bahwa dengan demikian landasan idiil Revolusi Indonesia jaitu Pantjasila, Manipol/Usdek dan segala pedoman pelaksanaannya, harus pula merupakan kaidah pokok fundamental bagi dasar penjusunan Undang-Undang Perkoperasian ;

3. Bahwa Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan dasar dan tudjuan Revolusi Indonesia dan untuk itu perlu disusun Undang-Undang Perkoperasian jang baru.

MEMINGGAT :

Pasal 2, 5, 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar ;

1. Ketetapan M.P.R.S. No. I dan II Tahun 1960 ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. III dan IV Tahun 1963 ;
3. Ketetapan M.P.R.S. No. V, VI, VII, VIII tahun 1965 ;
4. Resolusi M.P.R.S. No. I Tahun 1963 ;
5. Resolusi M.P.R.S. No. II Tahun 1965 ;

4. Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-rojong ;

MEMUTUSKAN :

5. Dengan mentjabut Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 tentang PERKUMPULAN KOPERASI ;

MEMENETAPKAN :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN.

B A B I.

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Undang-Undang ini :

"Koperasi" : Adalah badan termasuk dalam pasal 3, yang didirikan menurut ketentuan-ketentuan Bab Undang-Undang ini ;

"Perkoperasian" : Adalah segala sesuatu jang menjangkakan kehidupan koperasi jang berintikan pola koperasi dengan landasan idiil/haluan, organisasi dan usaha ;

"Gerakan Koperasian" : Adalah keseluruhan organisasi koperasi serta kegiatannya baik sebagai perkumpulan (perjuangan) maupun sebagai organisasi ekonomi, yang pengedjawantahannya termaksud dalam pasal 22, 23 dan 24 Undang-Undang ini ;

"Menteri" : Adalah Menteri jang diserahi urusan perkoperasian ;

"Pedjabat" : Adalah pedjabat-pedjabat jang mendapat tugas khusus dari Menteri untuk beberapa persoalan perkoperasian.

B A B II.

LANDASAN IDIIL KOPERASI

Pasal 2.

- (1). Landasan idiil koperasi Indonesia adalah Pantjasila.
- (2). Pengertian dan fungsi, azas dan dasar bekerdja serta kepribadian koperasi Indonesia dikembangkan menurut landasan idiil tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

B A B III.

PENGERTIAN DAN FUNGSI, AZAS DAN DASAR BEKERDJA KOPERASI

Pasal 3.

Koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat Revolusi jang berfungsi sebagai tempat persemiaan insan masjarakat serta wahana menudju Sosialisme Indonesia berdasarkan Pantjasila.

Pasal 4.

Koperasi mempunyai azas dan dasar bekerdja sebagai berikut :

- a. gotong-rojong, kekeluargaan dan swadaja ;
- b. bertudjuan mengembangkan kesedjahteraan anggauta dan masjarakat dalam rangka mentjapai dan membina masjarakat Sosialis Indonesia berdasarkan Pantjasila tanpa penghisapan oleh manusia atas manusia ;
- c. tidak merupakan konsentrasi modal ;
- d. sifat keanggotaannya sukarela dalam rangka demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin ;
- e. anggauta mempunyai kewadajiban, hak dan kepentingan jang sama ;
- f. keanggotaan tidak dapat dipindahkan kepada lain orang atau badan hukum dengan djalan apapun ;
- g. rapat anggauta merupakan kekuasaan tertinggi ;
- h. tiap keputusan rapat anggauta didasarkan atas musjawarah untuk mufakat ;
- i. tiap-tiap anggauta sesuai dengan tingkat kesadaran dan kemampuannya menjumbangkan materi, tenaga maupun pikiran untuk koperasi dan sesuai dengan karjanya menerima bagian dari setiap kemanfaatan koperasi dalam batas-batas kepentingan negara dan masjarakat ;
- j. usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka.

Pasal 5.

Konsepsi, struktur, aktivitas dari alat pembinaan serta alat perlengkapan organisasi koperasi, mentjerminkan kegotong-rojongan nasional progresif revolusioner berporoskan NASAKOM.

B A B IV.

PERANAN GERAKAN KOPERASI DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN DAN EKONOMI TERPIMPIN

Pasal 6.

Gerakan koperasi mempunyai peranan :

- a. Dalam Tahap Nasional Demokratis :
 1. mempersatukan dan memobilisir seluruh rakyat

pekerdja dan produsen ketjil jang merupakan tenaga-tenaga produktif untuk meningkatkan produksi, mengadakan dan meratakan distribusi;

2. ikut serta menghapuskan sisa-sisa imperialisme, kolonialisme dan feodalisme;
 3. membantu memperkuat sektor ekonomi Negara jang memegang posisi memimpin;
 4. mentijptakan sjarat-sjarat bagi pembangunan masyarakat Sosialis Indonesia.
- b. Dalam Tahap Sosialisme Indonesia :
1. menjelenggarakan tata-ekonomi tanpa adanya penghisapan oleh manusia atas manusia;
 2. meninggikan tingkat hidup rakjat djasmaniah dan rochaniah;
 3. membina dan mengembangkan swadaja dan daja kreatif rakjat sebagai perwujudan masyarakat gotong-rojong.

Pasal 7.

- (1). Pemerintah menetapkan kebidjaksanaan pokok perkeroperasian.
- (2). Dengan Peraturan Pemerintah diatur hubungan antara gerakan koperasi dengan Pemerintah. Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah dan Swasta bukan koperasi.

B A B V.

KEANGGAUTAN DAN ORGANISASI

Bagian 1.

Keanggotaan

Pasal 8.

Keanggotaan koperasi terdiri dari orang-orang atau badan hukum koperasi.

Pasal 9.

- (1). Jang dapat mendjadi anggauta koperasi primer ialah warga negara Indonesia jang;
 - a. mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tindakan hukum;
 - b. menjtetudiui Dasar dan Haluan Negara, pengertian dan fungsi, azas dan dasar bekerdja koperasi termaksud dalam pasal 2, 3 dan 4;
 - c. rakjat pekerdja dan produsen ketjil jang merupakan tenaga-tenaga produktif;
 - d. bertempat tinggal didaerah kerdja koperasi;
 - e. mempunyai kepentingan langsung dalam usaha-usaha koperasi;
 - f. mempunyai minat memadjukan usaha-usaha koperasi;
 - g. tidak mempunyai usaha jang bertentangan dengan usaha koperasi;
 - h. telah menjatakan kesanggupan untuk melakukan kewadajiban sebagaimana termaksud dalam pasal 11 dan pasal 32 ayat (2), (3) dan (4).
- (2). Jang dapat mendjadi anggauta koperasi jang lebih atas tingkatnja ialah koperasi jang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum menurut ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 10.

Pelaksanaan ketentuan pasal 8 dan 9 serta tjara-tjara untuk memperoleh keanggotaan dan berachirnja keanggotaan diatur dalam anggaran dasar koperasi termaksud dalam pasal 40.

Pasal 11.

ANGGOTA MEMPUNJAI KEWADJIBAN :

- a. berusaha untuk mengerti dan memahami landasan idiil, pengertian dan fungsi, azas dan dasar bekerdja serta peranan gerakan koperasi, dan ikut serta setjara

aktif mengembangkan, mendjaga keutuhan serta ketertiban organisasi gerakan koperasi;

- b. menjimpan setjara teratur pada koperasi;
- c. menghadiri rapat-rapat anggauta;
- d. memahami dan mengamankan keputusan-keputusan rapat anggauta dan setjara aktif mengawasi pelaksanaannja;
- e. ikut serta setjara aktif mensukseskan program kerdja gerakan koperasi pada umumnja, dan koperasi jang bersangkutan pada chususnja;
- f. membantu pengurus, badan pemeriksa dan pedjabat dalam melakukan tugasnja;
- g. mend'alankan ketentuan-ketentuan anggaran dasar dan keputusan-keputusan rapat anggauta.

Pasal 12.

Anggauta mempunyai hak :

- a. memilih dan atau dipilih mendjadi anggauta pengurus badan pemeriksa;
- b. menghadiri, menjatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggauta;
- c. mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggauta, baik diminta atau tidak;
- d. ikut serta melakukan peng'awasan atas djalannja organisasi dan usaha koperasi;
- e. minta diadakannja rapat anggauta menurut ketentuan-ketentuan anggaran dasar;
- f. mengadakan perhitungan pada achir tahun buku atas bag'annja, berdasarkan hubungan hukum jang timbul dari kewadajiban jang dilakukan untuk dan terhadap koperasi;
- g. mendapat pelajanan jang sama antara sesama anggauta dan hak jang didahulukan dari pada bukan anggauta.

Bagian 2.

Alat-alat perlengkapan organisasi koperasi.

Pasal 13.

Alat-alat perlengkapan organisasi-koperasi adalah :

- a. rapat anggauta;
- b. pengurus;
- c. badan pemeriksa.

Pasal 14.

- (1). Rapat anggauta adalah alat perlengkapan organisasi koperasi jang;
 - a. menetapkan kebidjaksanaan umum serta melaksanakan keputusan-keputusan koperasi jang lebih atas, Gerakan Koperasi Indonesia dan MUNAS-KOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, 24 dalam rangka pelaksanaan kebidjaksanaan pokok perkeroperasian jang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. menetapkan anggauta dasar;
 - c. membentuk pengurus dan badan pemeriksa.
- (2). Dalam rapat anggauta setiap anggauta jang hadir mempunyai kedudukan jang sama.
- (3). Tiap-tiap keputusan rapat anggauta didasarkan pada hikmah kebidjaksanaan musjawarah untuk mufakat.

Pasal 15.

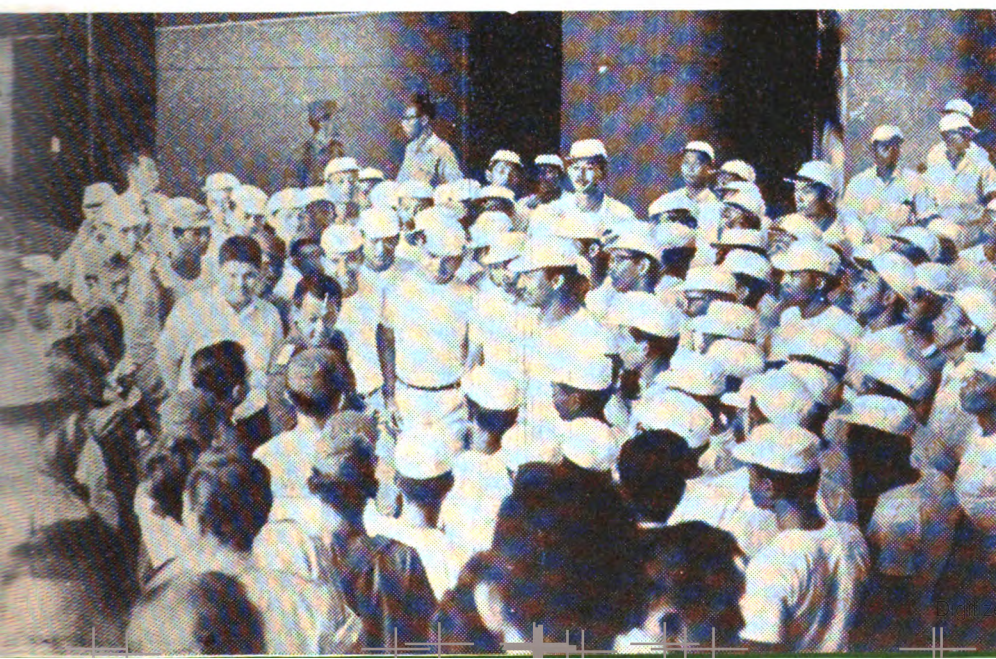
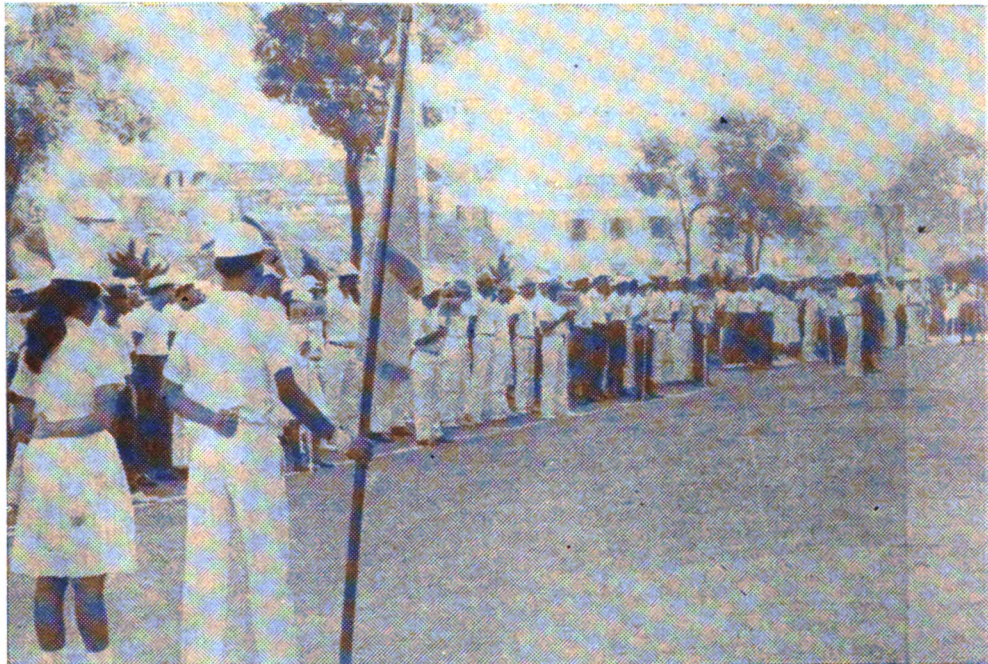
- (1). Pengurus adalah alat perlengkapan organisasi koperasi jang mempunyai kewadajiban melaksanakan keputusan rapat anggauta dan kewadajiban-kewadajiban lain jang mendjadi akibat dari ketentuan-ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga.
- (2). Pengurus dipilih oleh rapat anggauta dari anggauta koperasi.
- (3). Sesuai dengan perkembangan organisasi koperasi rapat anggauta dapat memilih/mengangkat oran



Apel Besar Olahragawan Departemen Perdagangan/P.N.N. jang diselenggarakan dihalaman depan gedung Departemen Perdagangan dalam rangka menjambut peringatan dwi dasawarsa proklamasi Kemerdekaan R.I.

Menteri Perdagangan Brigdjen Jusuf dalam Apel Besar Olahragawan tsb. antara lain menantikan, bahwa kita harus beladidik dan mendidik diri sendiri untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya.

Ap olahragawan harus menantikan kompetisi jang sehat dan melaksanakan slagorde yang kuat berupa pasukan jang terorganisir.



J.M. Menteri Brigdjen. A. Jusuf berkenalan langsung dan berbitjara dari hati kehati dengan para olahragawan dalam lingkungan Departemen Perdagangan.

DEPART DALAM PERING



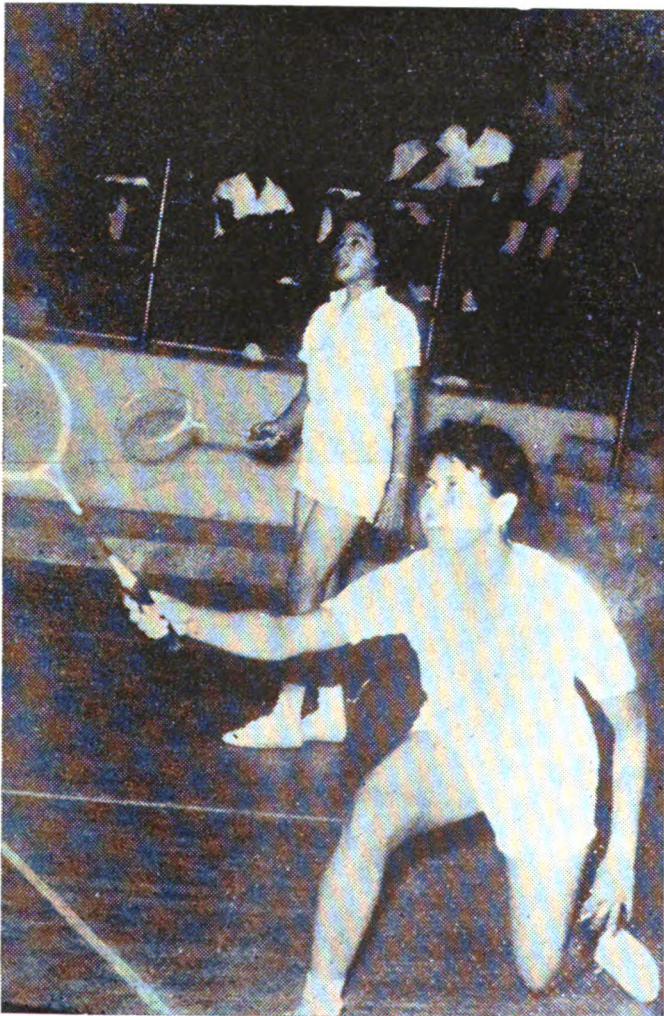
Masing-masing berusaha mengenai
sasarannya.

Team Kerda
mentjapai suk
Dasa Warsa
dalam lingk
sengadja dib
Menteri Perd

Adapun t
oleh Team K
njambut sert
dasawarsa pr
lain dngan m
raga, malam

Sebagian d
dapat kita lih
dalam nomor

Colahraga tidak hany
bermanfaat untuk keseha
tan badan dan fikiran, te
tapi djuga dapat menam
bah keakraban diantara
sesama olahragawannya.



PERDAGANGAN SERTA MENJAMBUAT SERTA MENSUKSESKAN DWI DASAWARSA KEMERDEKAAN R.I.

...mbut serta untuk
...n Peringatan "Dwi
...emerdekaan R.I."
...nen Perdagangan
...suatu Keputusan
...t Negeri.

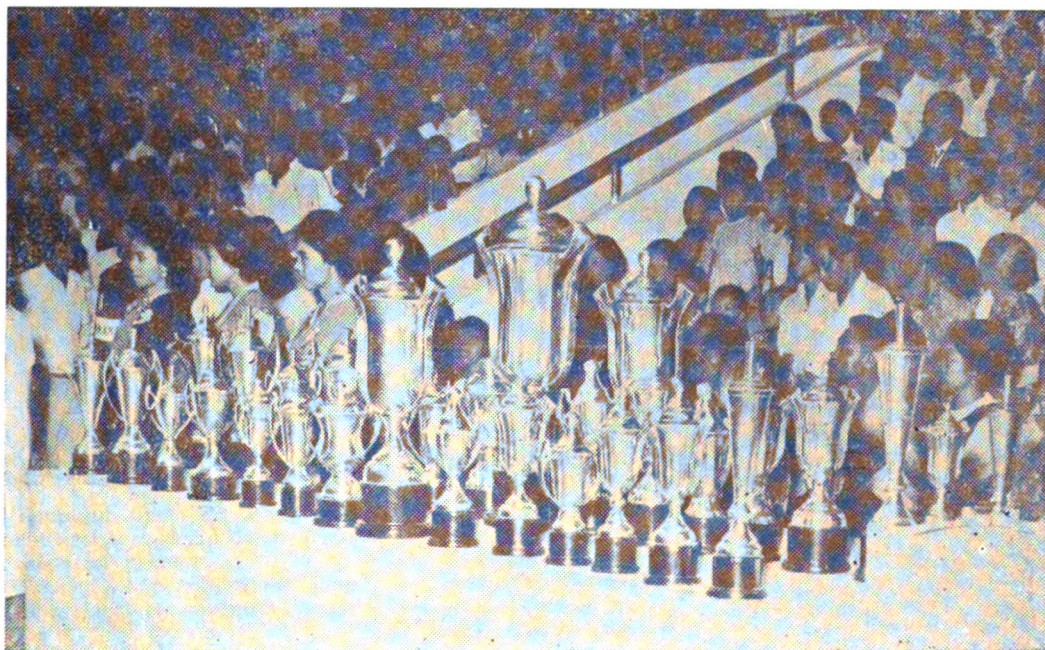
...g diselenggarakan
...dalam usaha me-
...n peringatan dwi
...1965 ini, antara
...rtandingan² olah

...g diselenggarakan
...to jang disadjikan



J.M. Menteri sedang memberi piala kepada salah seorang pemenang.

*Piala-piala untuk
para pemenang
tampak berjejer
sebelum dibagikan.*

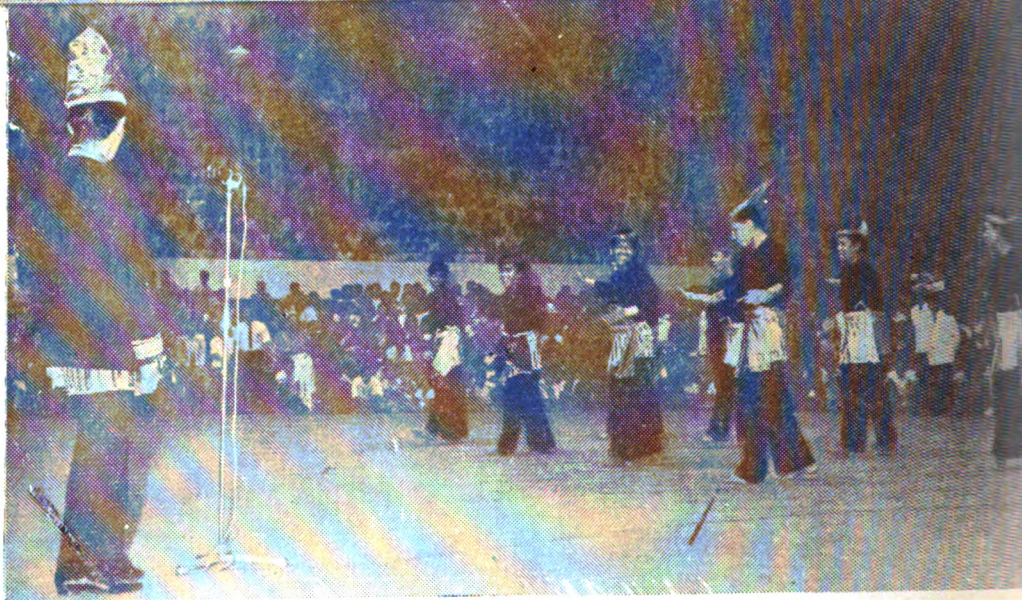


Paduan suara diselinggarakan oleh P.N. Aduma-Niaga



Sendratari Ramayana.

Tari Seudati, disumbangkan oleh karjawan Deperdagjang berasal dari Atjeh.



pihak ketiga menjadi anggota pengurus dengan maksimum tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota pengurus.

- 4). Syarat untuk dapat dipilih atau diangkat menjadi anggota pengurus ialah:
 - a. berjiwa Pantjasila dan Manipol;
 - b. memiliki sifat kejujuran dan ketrampilan kerja;
 - c. syarat-syarat lain ditentukan dalam anggaran dasar.
- 5). Dalam melaksanakan tugasnya termaksud dalam pasal ini ayat (1) pengurus bertanggung-jawab pada rapat anggota serta melaksanakan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakilinnya dihadapan dan diluar pengadilan.

Pasal 16.

- 1). Badan pemeriksa adalah alat perlengkapan organisasi koperasi yang mempunyai wewenang mengadakan pemeriksaan atas pekerjaan pengurus dan seluruh usaha koperasi serta bertanggung-jawab pada rapat anggota.
- 2). Dalam melaksanakan tugas termaksud dalam ayat (1) pasal ini badan pemeriksa mempunyai wewenang meneliti mengenai hal uang, surat berharga, perseediaan barang, peralatan, kebenaran pembukuan, kebid'aksanaan dalam menjelenggarakan usaha koperasi dan sjaah tidaknya pemilikan/penguasaan harta benda koperasi.
- 3). Ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam pasal 15 ayat (2), (3), (4), berlaku pula bagi badan pemeriksa.

Pasal 17.

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut dari pasal 14, 15 dan 16 diatur dalam anggaran dasar koperasi termaksud dalam pasal 40.

Bagian 3.

Kedudukan penasehat.

Pasal 18.

- 1). Apabila dianggap perlu, atas keputusan rapat anggota sesuai dengan anggaran dasar, pengurus dapat mengangkat penasehat-penasehat yang mempunyai tugas memberikan nasehat kepada pengurus koperasi, baik diminta atau tidak.
- 2). Penasehat yang diangkat dari bukan anggota koperasi yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan dari pejabat.

Bagian 4.

Organisasi Koperasi.

Pasal 19.

- 1). Djenis koperasi terdiri dari koperasi produksi dan koperasi konsumsi serta koperasi jasa-djasa termasuk koperasi simpan-pinjara sebagai pelengkap.
- 2). Berdasarkan pertimbangan dari Gerakan Koperasi Indonesia, Menteri dapat menetapkan setjara berentjana djenis koperasi untuk masing-masing daerah serta menentukan pola pengintegrasian antar djenis koperasi.

Pasal 20.

- 1). Sekurang-kurangnja duapuluh lima (25) orang yang telah memenuhi syarat-syarat termaksud dalam pasal 9 dapat membentuk koperasi primer.
- 2). Sekurang-kurangnja lima (5) koperasi primer yang telah berbadan hukum dapat membentuk pusat koperasi.

- 3). Sekurang-kurangnja tiga (3) pusat koperasi yang telah berbadan hukum dapat membentuk gabungan koperasi.
- 4). Sekurang-kurangnja tiga (3) gabungan koperasi yang telah berbadan hukum dapat membentuk induk koperasi.
- 5). Berdasarkan pertimbangan dari Gerakan Koperasi Indonesia, Menteri dapat mengatur penjimpangan-penjimpangan dari ketentuan ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini.

Pasal 21.

- 1). Daerah kerja koperasi ialah lingkungan usaha koperasi yang didasarkan pada kesatuan wilayah administrasi pemerintahan.
- 2). Penentuan daerah kerja untuk masing-masing tingkat koperasi sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal ini dan pasal 20 serta yang tidak didasarkan pada kesatuan wilayah administrasi pemerintahan diatur oleh Menteri.

Pasal 22.

- 1). Koperasi primer sampai dengan koperasi induk merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
- 2). Koperasi djenis yang satu dengan koperasi djenis yang lain merupakan kesatuan kegiatan ekonomi.
- 3). Gerakan Koperasi Indonesia melaksanakan pengintegrasian antar djenis koperasi, sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan ayat (1) dan (2) pasal ini.

Bagian 5.

Organisasi Gerakan Koperasi.

Pasal 23.

- 1). Musiawarah Nasional Koperasi, yang selanjutnja disebut MUNASKOP, merupakan Lembaga Tertinggi dari pada gerakan koperasi.
- 2). MUNASKOP menentukan kebidjaksanaan pelaksanaan perkoperasian dalam rangka pelaksanaan Pola Nasional dan kebidjaksanaan Pemerintah.
- 3). Peserta-peserta MUNASKOP terdiri dari:
 - a. utusan-utusan gerakan koperasi dari Daerah tingkat II, Tingkat I dan Tingkat Nasional;
 - b. pejabat-pejabat dan wakil-wakil Lembaga-Lembaga Negara Tingkat I dan Tingkat Nasional;
 - c. organisasi-organisasi massa Tingkat Nasional.
- 4). Hal-hal mengenai penyelenggaraan MUNASKOP diatur oleh Menteri.

Pasal 24.

- 1). Untuk melaksanakan keputusan-keputusan MUNASKOP termaksud dalam pasal 23 ayat (2) dibentuk organisasi tunggal dan piramidal yang disebut Gerakan Koperasi Indonesia.
- 2). Pimpinan Gerakan Koperasi Indonesia terdiri dari unsur-unsur:
 - a. pejabat-pejabat Pemerintah;
 - b. wakil-wakil koperasi;
 - c. wakil-wakil organisasi massa.
- 3). Lapangan kegiatan Gerakan Koperasi Indonesia adalah meliputi bidang-bidang:
 - a. pembinaan usaha;
 - b. penelitian;
 - c. perentjanaan;
 - d. pengawasan;
 - e. pendidikan;
 - f. penerangan.

- (4). Pembentukan badan termaksud dalam ayat (1) pasal ini serta penentuan garis-garis besar susunan organisasi serta perintjan tugasnya diatur dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.

Bagian 6.

Administrasi.

Pasal 25.

- (1). Koperasi wajib mengadakan administrasi dan pembukuan jang teratur dan tertib.
- (2). Sjarat-sjarat pembukuan, buku daftar anggota, buku daftar pengurus dan buku daftar badan pemeriksa diatur oleh Menteri.

B A B VI.

KOPERASI SEBAGAI ORGANISASI EKONOMI.

Bagian 1.

Dasar aktivitas ekonomi.

Pasal 23.

Setiap aktivitas koperasi sebagai organisasi ekonomi ditunjukkan untuk memenuhi keperluan serta untuk meningkatkan kesedjahteraan anggota dan masyarakat.

Bagian 2.

Perusahaan koperasi.

Pasal 27.

- (1). Koperasi dapat mendirikan dan memiliki perusahaan dengan sjarat-sjarat sebagai berikut:
 - a. organisasi koperasi jang bersangkutan telah memenuhi segala sjarat jang ditentukan dalam Undang-Undang ini, khususnya sjarat-sjarat jang ditentukan dalam pasal 4, 6, 9, 20, 22, 26 dan 28;
 - b. perusahaan koperasi tersebut baru dapat didirikan atau terus dilangsungkan pengusahaannya setelah ada persetujuan/idzin dari Menteri.
- (2). Hal-hal lebih lanjut mengenai ketentuan dan pelaksanaan tentang perusahaan koperasi dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian 3.

Iuran Negara dan dana-dana.

Pasal 28.

- (1). Anggauta dan masyarakat jang dilajani keperluaannya serta ditingkatkan kesedjahteraannya oleh koperasi, sebagaimana termaksud dalam pasal 26, ikut membeajai keperluan organisasi koperasi dan usaha koperasi.
- (2). Selisih lebih antara beaja jang dipungut termaksud dalam ayat (1) pasal ini dan beaja jang sesungguhnya dikeluarkan, jang terdapat pada penutupan tahun buku setelah dikurangi iuran Negara, ditetapkan bagiannya sebagai berikut:
 - a. sekurang-kurangnya 25% untuk tjadangan koperasi;
 - b. 25% untuk anggauta menurut imbangan djasanja;
 - c. kelebihanannya untuk dana-dana jang ditentukan dalam anggaran dasar atau jang ditetapkan oleh rapat anggauta;kesemuannya jang telah direntjanakan lebih dahulu.

Pasal 29.

- (1). Anggauta dan masyarakat jang dilajani keperluaannya serta ditingkatkan kesedjahteraannya oleh koperasi sesuai dengan ketentuan pasal 4 huruf i memberikan sumbangan untuk:

- a. dana iuran Negara;
- b. dana pembangunan koperasi;
- c. dana masyarakat.

- (2). Pungutan dana pembangunan koperasi dan dana masyarakat diatur dengan peraturan Menteri.
- (3). Ketentuan mengenai zakat bagi koperasi diatur oleh Menteri bersama-sama dengan Menteri Agama.
- (4). Pungutan sumbangan-sumbangan selain tersebut dalam ayat (1) pasal ini dan jang tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan ayat (2), dan ayat (3) pasal ini serta pasal 30 dilarang.

Pasal 30.

Iuran Negara jang disumbangkan melalui koperasi termaksud dalam ayat (2) pasal 28 dan ayat (1) pasal 29 diatur oleh Menteri jang disertai iuran Negara bersama-sama dengan Menteri, dengan mengingat ketentuan pasal 2, 3, 4, 6, 27, 28 dan 29.

Bagian 4.

Permodalan.

Pasal 31.

- (1). Modal koperasi adalah keseluruhan aktiva serta pasiva koperasi.
- (2). Penjualan modal koperasi termasuk dalam ayat (1) pasal ini didasarkan pada usaha kegotong-rojongan anggauta, sesuai dengan ketentuan pasal 4 huruf i dalam bentuk simpanan-simpanan, kekayaan koperasi dan pindjaman-pindjaman serta lain-lain sumber jang sah.
- (3). Hal-hal mengenai pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 32.

- (1). Simpanan-simpanan termaksud dalam ayat (2) pasal 31 terdiri dari:
 - a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. simpanan wajib khusus;
 - d. simpanan sukarela;
- (2). Simpanan pokok ialah suatu djumlah tertentu dalam nilai uang jang sama besarnya bagi tiap-tiap anggauta, jang wadajib diserahkan atau disanggupkan antara tertulis akan diserahkan kepada koperasi pada waktu akan mendjadi anggauta.
- (3). Simpanan wajib ialah suatu djumlah tertentu dalam nilai uang jang sama besarnya bagi tiap-tiap anggauta, jang wadajib diserahkan oleh anggauta kepada koperasi pada waktu-waktu dan kesempatan tertentu.
- (4). Simpanan wajib khusus ialah suatu djumlah tertentu dalam nilai uang jang wadajib diserahkan oleh anggauta kepada koperasi pada waktu-waktu dan kesempatan tertentu.
- (5). Simpanan sukarela ialah suatu djumlah tertentu dalam nilai uang jang diserahkan oleh anggauta kepada koperasi.

Pasal 33.

- (1). Simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama jang bersangkutan masih mendjadi anggauta.
- (2). Simpanan wajib khusus dapat diambil kembali hanya dalam waktu tertentu menurut anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan-keputusan rapat anggauta koperasi.

Pasal 34.

- 1). Penjimpanan dan lalu lintas uang koperasi dilakukan melalui Bank Pemerintah yang bergerak dalam bidang perkoperasian.
- 2). Pelaksanaan dan penjimpanan ketentuan ayat (1) pasal ini diatur oleh Menteri bersama-sama Menteri Bank Sentral.

Bagian 5.

Tanggung an.

Pasal 35.

Tanggung an ialah hal pertanggung an djawab untuk enanggung atau menjelesaikan suatu kerugian yang mbul sebagai akibat :

sesuatu tindakan, dan atau
sesuatu kedjadian.

Pasal 36.

- 1). Tanggungan dapat dibebankan kepada :
 - a. koperasi dan atau anggauta yang selandjutnja disebut tanggungan koperasi, atau
 - b. pengurus yang selandjutnja disebut tanggungan pengurus.
- 2). Tanggungan koperasi terdjadi apabila kerugian itu tidak ditimbulkan oleh karena kelalaian/kesalahan pengurus.
- 3). Tanggungan pengurus terdjadi apabila kerugian itu ditimbulkan oleh karena kelalaian/kesalahan pengurus.
- 4). Untuk menentukan apakah tanggungan itu adalah tanggungan pengurus atau tanggungan koperasi diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Pasal 37.

1). Kerugian yang timbul pada penutupan tahun buku diselesaikan dalam rapat anggauta tahunan dengan mengingat ketentuan pasal 36 ayat (4).

2). Kerugian yang timbul pada pembubaran koperasi karena kelangsungan hidupnja tidak dapat diharapkan lagi, diselesaikan oleh penjelesai, termaksud dalam pasal 49, yang hanja dapat dibebankan pada kekajaan koperasi dan atau djumlah tanggungan anggauta.

3). Anggauta yang keluar tidak bebas dari kewajiban menanggung kerugian termaksud dalam ayat (2) pasal ini, sepanjang hal ini menjangkut tanggungan koperasi termaksud dalam pasal 36 ayat (2) dan timbul sebagai akibat dari sesuatu tindakan atau kedjadian yang bersangkutan masih mendjadi anggauta, dengan ketentuan bahwa saat keluarnja anggauta tersebut sampai waktu 2 (dua) tahun.

4). Anggauta menanggung tanggungan koperasi termaksud dalam ayat (1) pasal ini, masing-masing untuk bagian yang sama besarnja dan apabila diantara mereka ada yang tidak mampu untuk membayar penuh bagian tanggungannja, maka anggauta yang lain diwadjibkan menanggung kerugiannja masing-masing sama besarnja.

5). Besarnja djumlah tanggungan djika koperasi dibubarkan tidak boleh melampaui batas tertinggi yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi yang dibubarkan itu.

Pasal 38.

al-hal lebih landjut mengenai tanggungan diatur de-
n Peraturan Menteri.

B A B VII.

KEDUDUKAN HUKUM KOPERASI

Bagian 1.

Kedudukan hukum koperasi.

Pasal 39.

Koperasi yang didirikan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah badan hukum dan tunduk kepada Perundang-undangan yang berlaku, sepanjang ketentuannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Bagian 2.

Syarat-syarat mendirikan koperasi.

Pasal 40.

- (1). Koperasi didirikan dengan akte pendirian yang memuat :
 - a. nama dan nama ketjil, tempat tinggal dan pekerjaan mereka yang diberi kuasa menanda tangani akte pendirian oleh rapat pembentukan ;
 - b. anggaran dasar koperasi yang telah diputuskan oleh rapat pembentukan yang antara lain memuat :
 1. nama koperasi, tempat kedudukan dan daerah kerdjajnja ;
 2. azas dan tudjuan ;
 3. lapangan usaha ;
 4. keanggotaan ;
 5. hak dan kewajiban anggauta ;
 6. hak dan kewajiban rapat anggauta, pengurus dan badan pemeriksa ;
 7. tahun buku koperasi ;
 8. permodalan ;
 9. tanggungan ;
 10. dana-dana ;
 11. ketentuan tentang sisa kekajaan bila koperasi dibubarkan.
- (2). Isi anggaran dasar tersebut dalam ayat (1) pasal ini, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- (3). Menteri memberikan pedoman-pedoman tentang tjara penjusunan anggaran dasar.
- (4). Akte pendirian rangkap 2 (dua) termaksud dalam ayat (1) pasal ini, bersama-sama petikan berita atjara tentang rapat pembentukan, yang antara lain menjatakan djumlah anggauta dan nama mereka yang diberi kuasa untuk menanda tangani akte pendirian, dikirim kepada pedjabat.
- (5). Akte pendirian dan petikan berita atjara termaksud dalam ayat (4) pasal ini, tidak bermeterai.

Pasal 41.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 40 berlaku terhadap perubahan anggaran dasar koperasi, dengan ketentuan akte perubahan dikirim bersama-sama petikan berita atjara yang menjatakan bahwa perubahan anggaran dasar tersebut diputuskan dalam rapat anggauta menurut sjarat dan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 42.

- (1). Pada waktu menerima akte pendirian, pedjabat yang berwenang memberikan pengesahan badan hukum, mengirim sebuah tanda terima yang bertanggal kepada pendiri koperasi dengan surat tertjatat.
- (2). Djika pedjabat berpendapat bahwa isi akte pendirian tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, maka akte pendirian didaftar dengan memakai nomor urut dalam buku daftar umum yang disediakan untuk keperluan itu pada kantor pedjabat.
- (3). Tanggal pendaftaran akte pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinja koperasi.

- (4). Kedua buah akte pendirian tersebut dalam pasal 40 ayat (4) dibubuhi tanda pengesahan oleh pedjabat atas kuasa Menteri, tanggal dan nomor pendaftarannja. Sebuah akte pendirian disimpan dikantor pedjabat, sedang sebuah lainnja dikirimkan kepada pendiri koperasi.
- (5). Djiika ada perbedaan antara akte pendirian jang telah disahkan tersebut, maka jang disimpan dikantor pedjabat jang dianggap benar.
- (6). Pedjabat mengumumkan tiap-tiap pengesahan koperasi dalam Berita Negara.
- (7). Pendaftaran dan pengumuman dilakukan tanpa beaja dan tanda pengesahan bebas dari meterai.
- (8). Buku daftar umum beserta akte-akte jang tersimpan pada kantor pedjabat dilihat dengan tjuma-tjuma oleh umum, dan dengan mengganti beaja-beaja dapat diperoleh salinan maupun petikan akte-akte.

Pasal 43.

Sedjak tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) koperasi adalah badan hukum dan segala hak dan ikatan jang timbul dan diadakan atas namanja sebelum tanggal pendaftaran tersebut, setelah itu beralih kepadanya.

Pasal 44.

- (1). Pedjabat berkewadjiaban dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan telah memberikan pengesahan seperti tersebut dalam pasal 42 terhitung sedjak pedjabat tersebut menerima permintaan pengesahan.
- (2). Batas waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku bila pedjabat berkeberatan berhubung menurut penilaiannja, bahwa akte pendirian dan anggaran dasar jang disampaikan oleh pendiri jang bersangkutan bertentangan dengan Undang-Undang ini dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannja, jang dalam hal ini pedjabat wadjiab memberikan surat penolakan jang memuat alasannja kepada pendiri.
- (3). Bila terdapat perbedaan pendapat antara pedjabat dengan pendiri dalam menilai mengenai apakah pendirian dan anggaran dasar sesuai atau tidak dengan Undang-Undang ini serta ketentuan-ketentuan-pelaksanaannja, maka pendiri dapat mengajukan banding pada pedjabat jang lebih tinggi dengan ketentuan bahwa keputusan Menteri adalah keputusan jang terakhir.

Pasal 45.

Menteri dapat memberikan kepada pedjabat-pedjabat didaerah hak pemberian pengesahan badan hukum bagi koperasi untuk wilayah masing-masing.

Pasal 46.

Ketentuan dalam pasal 41 dan 43 berlaku pula terhadap perubahan jang dimaksud dalam pasal 40.

Pasal 47.

Perkumpulan atau organisasi atau lembaga lain jang bergerak dalam bidang perkoperasian dan tidak didirikan menurut ketentuan Undang-Undang ini, dilarang menggunakan nama/istilah koperasi tanpa persetujuan Menteri.

Bagian 3.

Pembubaran Koperasi.

Pasal 48.

- (1). Pembubaran koperasi dilakukan bila :
 - a. terdapat alasan serta bukti-bukti jang tjukup bahwa koperasi jang bersangkutan tidak memenuhi sjarat-sjarat jang ditentukan dalam pasal 2, 3, 4, 5, 6, 9 dan 20 Undang-Undang ini, atau

- b. bertentangan dengan ketertiban umum dan kesucilaan, atau
- c. pembubaran itu diharuskan karena ketentuan Undang-Undang ini, atau
- d. pembubaran tersebut dikehendaki para anggota.

- (2). Norma penilaian jang dipergunakan oleh pedjabat bila terdjadi alasan-alasan pembubaran tersebut dalam ayat (1) huruf a, b dan c pasal ini, diatur oleh Menteri.
- (3). Keberatan atas penilaian pedjabat tersebut diajukan kepada pedjabat jang lebih tinggi dengan ketentuan bahwa keputusan Menteri merupakan keputusan jang terakhir, prosedurnja diatur dalam pasal 49.

Pasal 49.

- (1). Pembubaran koperasi jang didasarkan pada alasan tersebut dalam pasal 48 ayat (1) huruf a, b, dan c dilakukan dengan keputusan pedjabat, dengan tjatatannya bahwa keputusan tersebut tidak dapat dilakukan sebelum pedjabat memberitahukan maksudnja tentang keputusan itu dengan surat tertjatat kepada koperasi jang bersangkutan, kepada pedjabat jang lebih tinggi dan kepada Menteri.
- (2). Pembubaran koperasi jang didasarkan pada alasan tersebut dalam pasal 48 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan keputusan pedjabat setelah ada keputusan sah rapat anggota khusus sebagaimana dijnatakan dalam petikan berita atjara tidak bermeterai dari koperasi jang bersangkutan.
- (3). Dalam tenggang waktu 3 bulan dihitung sedjak tanggal pengiriman surat tertjatat jang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka baik pengurus maupun sekurang-kurangnya sepertiga anggota koperasi dapat mengajukan keberatan kepada pedjabat jang lebih tinggi dan seterusnya kepada Menteri terhadap maksud pedjabat jang akan membubarkan koperasi.
- (4). Setelah tenggang waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini berakhir, maka pedjabat jang lebih tinggi dan seterusnya Menteri segera memberitahukan kepada pedjabat dan koperasi jang bersangkutan tentang keputusannya dengan surat tertjatat.

Pasal 50.

Dalam surat keputusan pedjabat tentang pembubaran koperasi sekaligus memuat nama seorang atau beberapa orang jang diberi tugas untuk melaksanakan penjelesian dan selanjutnja disebut penjelesai, jang mempunyai kekuasaan sebagaimana jang dimaksud dalam pasal 53.

Pasal 51.

- (1). Keputusan tentang pembubaran koperasi serta penangkatan penjelesai diumumkan dalam Berita Negara.
- (2). Penjelesai dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam menjalankan tugasnja setelah sediak tanggal dikeluarkannya surat keputusan oleh pedjabat tentang pembubaran koperasi dan penangkatannya sebagai penjelesai.

Pasal 52.

- (1). Pembubaran koperasi serta tanggal nomor Berita Negara jang memuat pengumuman pembubaran ditiatat dalam buku daftar umum pada tempat pendaftaran akte pendirian oleh pedjabat.
- (2). Pengumuman dalam Berita Negara, tjatatannya dalam buku daftar umum dan tjatatannya pada kedua buah akte pendirian itu dilakukan tanpa beaja. Tjatatannya pada akte pendirian bebas dari bea meterai.

Pasal 53.

- 1). Penjelesai mempunyai kekuasaan sebagai berikut:
 - a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta mewakilinja didalam atau diluar Pengadilan;
 - b. memanggil anggauta dan bekas anggauta termaksud dalam pasal 37 ayat (3), baik satu persatu atau bersama-sama untuk mengadakan rapat;
 - c. menetapkan djumlah bagian tanggungan yang harus dibayar oleh masing-masing anggauta dan bekas anggauta termaksud dalam fasal 37 ayat (3);
 - d. menetapkan oleh siapa dan menurut perbandingan bagaimana beaja penjelesaian harus dibayar;
 - e. mempergunakan sisa kekajaan koperasi sesuai dengan azas tudjan koperasi atas keputusan rapat anggauta terakhir.
 - f. menentukan kegunaan dan penjimpanan segala arsip koperasi.

- 2). Setelah selesai penjelesaian, maka penjelesai membuat berita atjara tentang penjelesaian itu.
- 3). Pembayaran beaja penjelesaian didahulukan dari pada pembayaran hutang lainnja.

B A B VIII.

PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN KOPERASI

Bagian 1.

Perlindungan.

Pasal 54.

Segenap instansi Pemerintah dan Perusahaan-Perusahaan Negara baik dipusat maupun didaerah, diwajibkan melindungi dan membimbing gerakan koperasi menurut bidangnya masing-masing sesuai dengan pola yang ditentukan oleh Menteri.

Bagian 2.

Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 55.

1). Untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang ini dibentuk Direktorat Koperasi sebagai organisasi pembinaan/pengawasan koperasi dan diatur dengan Peraturan Presiden atau atas kuasa Peraturan Presiden mengingat ketentuan pasal 5 Undang-Undang ini.

2). Menteri menundjuk pedjabat dan menentukan batas-batas wewenang pedjabat yang diserahi tugas untuk memimpin instansi Pemerintah dibidang pembinaan/pengawasan tersebut dalam ayat (1) maupun melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, serta mengatur koordinasi dan hubungan kerdja antara Direktorat Koperasi, Gerakan Koperasi Indonesia dan badan/instansi lain yang bergerak dibidang pembinaan dan pengawasan koperasi.

B A B IX.

KETENTUAN PIDANA.

Pasal 56.

1). Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginja lima ribu rupiah, anggauta pengurus yang dengan sengadja atau karena lalai, melanggar ketentuan

dalam pasal 25 ayat (1) dan barang siapa yang dengan sengadja atau karena kelalaian melanggar ketentuan dalam pasal 47.

- (2). Dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginja lima ratus ribu rupiah atau hukuman kurungan setinggi-tingginja satu tahun barang-siapa yang dengan sengadja melanggar ketentuan dalam pasal 29 ayat (4).
- (3). Perbuatan-perbuatan yang diantjam dengan hukuman tersebut dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran.
- (4). Perbuatan-perbuatan yang diantjam dengan hukuman tersebut dalam ayat (2) pasal ini merupakan kejahatan.
- (5). Sanksi-sanksi administrasi diatur oleh Menteri.

B A B X.

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57.

- (1). Koperasi golongan dapat didirikan dilingkungan-lingkungan kerdja.
- (2). Koperasi golongan hanya diidzinkan bekerdja dalam lapangan yang menjangkut keperluan serta kepentingan anggauta.
- (3). Pemerintah dengan berentjana mengintegrasikan koperasi golongan dengan koperasi menurut ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 58.

- (1). Penjesuaian koperasi yang telah didirikan menurut Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi dengan Undang-Undang ini dilakukan menurut prosedur yang ditentukan dalam peraturan pelaksanaan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sesudah berlakunja Undang-Undang ini.
- (2). Segala ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Koperasi No. 79 Tahun 1958 yang bertentangan dengan Undang-Undang ini, tidak berlaku lagi sedjak berlakunja Undang-Undang ini.
- (3). Pemerintah segera mengeluarkan Peraturan-Peraturan pelaksanaan dan berwenang mengatur hal-hal yang belum ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

B A B XI.

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 59.

Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Perkoperasian dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di : D J A K A R T A.

Pada tanggal : 3 Agustus 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S U K A R N O.

P. N. DHARMA NIAGA

I M P O R : Mesin² untuk Pertjetakan — Industri — Pertanian — Perkebunan — Tekstil.

Mesin² Perkakas — Pendingin — Minjak Kelapa — Pompa² dan Mesin untuk Pembangunan..

Alat² Besar — Kereta Api — Mesin² Pertambangan Clark Forklifts. Mesin² DIESEL/Generating sets — Alat² RADIO/elektronik/Telekomunikasi dan motor² listrik.

PERDAGANGAN UMUM : Dalam Negeri/Antar Pulau.

INSTALASI : Telepon dan listrik dengan tenaga² Ahli.

PERBENGKELAN : Service dan pemasangan mesin.

Kantor Pusat :

Djalan Tanah Abang Barat 6 - 8 - 10 — Djakarta.
P.O. Box 2028 — Tel. 47557 - 47577 - 49978 - 41974
Telex 292

Kantor Tjabang Djakarta

Djalan Djembatan Batu 50 — Tel. 22041 - 22042 - 22043 - 22044
Djakarta Kota.

Tjabang-Tjabang :

BANDUNG — SEMARANG — SURABAJA — MEDAN —
PONTIANAK — PALEMBANG — TJIREBON — JOGJA-
KARTA — MALANG — DJEMBER — BANDJARMASIN —
MAKASSAR — MENADO — AMBON — DENPASAR —
BANDA ATJEH — PADANG dan PAKANBARU.

Ekonomi/Perdagangan Internasional

1. **INDONESIA** — *Ekspor Karet Indonesia ke Djepang meningkat karena konfrontasi.* Ekspor karet Indonesia ke Djepang sedjak dimulainja konfrontasi dengan projek Nekolim "Malaysia" meningkat terus, sebaliknya ekspor dari Malaysia ke Djepang menurun. Sesudah adanja konfrontasi ekspor karet Indonesia dalam tahun 1964 naik 7%, sedangkan tahun-tahun sebelumnya ekspor karet Indonesia ke Djepang berdjumlah 0.2% dari seluruh djumlah ekspor karet. Dan dalam 6 bulan pertama tahun 1965 impor karet Djepang dari Indonesia sudah mentjapai angka 38.2%. Sebaliknya ekspor karet "Malaysia ke Djepang" yang dalam tahun 1963 berdjumlah 60% dari seluruh ekspor karet "Malaysia" dalam tahun 1964 turun mendjadi 35% dan dalam bulan pertama 1965 angka ini menurun lagi sampai 18%.

2. **Team TJEKOSLOWAKIA mengadakan survey dipertambahan embaga Toradja.** Team Ekspert tjekoslowakia yang terdiri dari 4 orang sedang mengadakan survey dipertambahan tembaga angkarapi di Toradja, Sulawesi Tengah. Team tersebut disertai oleh beberapa ahli Indonesia.—

3. **INDONESIA MENDUDUKI TEMPAT NOMOR 3 SEBAGAI NEGARA PENGEKSPOR TEH KE DJERMAN BARAT.** Indonesia telah berhasil mempertahankan peranannya yang tradisionil dalam perdagangan teh di Jerman. Pada waktu ini Indonesia menduduki tempat nomor 3 sebagai negara pengeksporteh ke Jerman Barat disamping India dan Srilangka. Ketiga negara ini memenuhi 9/10 dari kebutuhan Jerman akan teh.

4. **DJEPANG** — *Ekspor Djepang meningkat.* Ekspor Djepang dalam tahun 1964 berdjumlah S \$ 6.670 djuta, US \$ 1.200 djuta lebih besar dari tahun 1963, demikian diumumkan oleh Departemen Perdagangan Internasional dan Industri Jepang. Departemen tersebut selandjutnja menerangkan walaupun trend perdagangan Djepang baik, ada tanda-tanda diadakannya proteksi dan persaingan keras diantara negara-negara barat yang sudah maju terhadap hasil-hasil industri Jepang.

5. **Peraturan pajak untuk mendorong INDUSTRI DJEPANG.** Dalam suatu sidang kabinet Djepang, Perdana Menteri Djepang Sato mengumumkan bahwa peraturan pajak yg dratis akan segera dibuat untuk mendorong industri, obligasi djang panjang akan dikeluarkan dalam tahun 1966 untuk pertama kalinya sesudah Perang Dunia. 200 djuta akan diberikan untuk hutang-hutang pemerintah dan £ 84 djuta akan dipergunakan

untuk projek-projek yang vital untuk mengembangkan kehidupan ekonomi. Langkah-langkah lainnja yang akan diambil termasuk penurunan daripada tingkat bunga.

6. **PHILIPINA** — *Kopra.* Departemen Pertanian Philipina mengatakan bahwa ekspor kopra dan minjak kelapa dari Philipina dalam masa Djanuari-Mei tahun ini tertjatat sebanjak 250.048 long ton 4% dibawah djumlah 261.396 yang diekspor dalam masa yang sama tahun yang lalu.

Ekspor minjak kelapa 16% lebih besar dari ekspor dalam masa Pebruari-Mei 1964. Bulan Mei ekspor berdjumlah 20.191 ton sedangkan bulan April berdjumlah 8.360 ton.

Ekspor kopra turun 13% selama lima bulan pertama. Ekspor dalam bulan Mei berdjumlah 46.760 ton, sedangkan dalam bulan April berdjumlah 39.224 ton.

7. *Impor PHILIPINA lebih besar daripada ekspor.* Impor Philipina dalam tahun 1964 berdjumlah 60 djuta pesos lebih besar daripada impornja. Demikian diberitakan oleh Biro Sensus dan Statistik Philipina. Perdagangan Philipina tahun yang lalu berdjumlah 6.153.101.945. Djumlah impor tertjatat ada 3.106.707.321 sedangkan ekspornja P 3.046.394.624.

Dibandingkan dengan tahun 1963 djumlah perdagangan dalam tahun 1964 naik sebanjak 15,13% atau P 808.572.729. Djumlah perdagangan dalam tahun 1963 berdjumlah P 5.344.529.216.

Djumlah impor 1965-25% atau sebanjak P 620 djuta lebih besar daripada impor tahun sebelumnya. Ekspor untuk djangka waktu yang sama hanja naik sebesar 6,6% atau 189 djuta.

8. *Produksi gula DUNIA.* Departemen Pertanian Amerika Serikat menaksir bahwa produksi gula dunia untuk masa 1964-1965 sebanjak 70,1 djuta ton. bruto. Djumlah ini melebihi masa panen tahun yang lalu sebanjak 18%.

Dikatakan selandjutnja kenaikan ini disebabkan karena keadaan tjuatja yang baik di hampir semua daerah produksi gula. Produksi terutama untuk Amerika Utara, Eropa dan Asia adalah tjukup. Perobahan produksi terdjadi sedikit di Afrika. Adalah terlalu pagi untuk meramalkan masa panen 1965/1966. Keadaan tjuatja di beberapa negara kurang memuaskan djika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Australia, Republik Dominika dan Afrika Selatan mengalami musim kering yang akan mengakibatkan panen (produksi) turun. Beberapa negara yang merentjanakan akan

memperluas produksi gula jang tampaknja kurang semangat karena panen terlalu banjak dalam tahun 1964/1965.

Produksi gula Kuba dalam masa 1964/1965 berdjumlah 6 djuta ton, jaitu 2 djuta lebih besar daripada tahun sebelumnya. Produksi Amerika Serikat berdjumlah 6,5 djuta ton sedikit lebih banjak dari djumlah dalam tahun 1963/1964.

9. **TJOKLAT DUNIA.** Keadaannja lebih buruk daripada tahun tigapuluhan. Harga tjoklat jang £ 100 per ton sekarang harganja menurun sedjak Perang Dunia II. Dibandingkan dengan tahun tigapuluhan keadaan tjoklat sekarang sangat buruk. Kenaikan produksi lebih besar daripada kenaikan konsumsinja (produksi naik 25% sedang konsumsi hanja naik 10%). Pertambahan produksi tjoklat dunia bertambah 2½ djuta ton sedjak tahun 1959 karena adanya tjara-tjara penanaman baru dan pemberantasan hama jang baik.

Untuk Ghana, dimana tjoklat merupakan sumber devisen, adanya penurunan harga merupakan suatu bentjana. Harga pendjualan per ton turun dari £ 150 (tahun 1956) mendjadi £ 112 dalam tahun 1960-1962 dan hanja £ 93 untuk tahun 1965.

Ghana jang memproduksi kira-kira 250.000 ton dalam pertengahan tahun 1950 telah meningkat produksinja mendjadi lebih baik dari 400.000 ton tiap tahunnja sedjak tahun 1960.

Sementara itu hal jang menggembirakan adalah bahwa konsumsi tjoklat di Djepang dalam tahun 1964 naik 32½% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan Australia walaupun konsumsi tjoklat sedikit, produksi tjoklat meningkat 30% dari tahun sebelumnya.

10. **MUANGTHAI** — 60 Negara ambil bagian pada Thai Fair. Kira-kira 60 negara-negara dan

lebih dari 300 penyelenggara pameran akan mengambil bagian pada "ASIAN INTERNATIONAL TRADE FAIR I" di Thailand jang akan berlangsung pada bulan-bulan Nopember dan Desember tahun jang akan datang.

11. **R.D.D.** — *Leipzig Autumn Fair.* 6.500 perusahaan-perusahaan dagang dari 60 negara didunia ini turutserta mengambil bagian pada "LEIPZIG AUTUMN FAIR" jang berlangsung pada tanggal 5 s/d 12 September 1965. Diperkirakan lebih dari 230.000 tamu dari 80 negara menghadiri fair tersebut.

12. **AMERIKA SERIKAT** — Kenaikan harga di Amerika Serikat menghawatirkan para ahli ekonominja. Apakah Amerika Serikat sedang mengalami inflasi, pertanjaan ini mendapat perhatian jang serius. Para ahli ekonomi mengetahui bahwa inflasi (jang njata) akan merugikan masyarakat Amerika Serikat, karena pendapatan mereka tidak dapat mengikuti kenaikan harga-harga. Keadaan ini dapat berarti djuga suatu krisis moneter internasional, karena orang-orang (negara-negara) lainnja membajar dalam dolar untuk membeli mas dari Perbendaharaan Keuangan Amerika.

13. **INDIA** — *India impor gandum dari Amerika Serikat.* Untuk mengatasi kekurangan bahan makanan didalam negeri, Pemerintah India terpaksa harus mengimpor gandum dari Amerika Serikat seharga 230 djuta rupee. Adanja impor gandum dari Amerika Serikat ini menundjukkan kegagalan Pemerintah India dibidang pertanian. Dikabarkan selanjutnja bahwa India mengkonsumir impor satu djuta ton gandum dari Amerika Serikat untuk tiap-tiap dua bulan.

(Sambungan dari hal. 11)

K E E M P A T :

Koordinasi, Pengendalian Operasi, pengawasan dan pengamanan dan penertiban dari realisasi ekspor dilakukan oleh Team Crash Program Ekspor Pusat/Daerah.

K E L I M A :

1. Semua ketentuan jang tertjantum dalam Keputusan ini merupakan direktif bagi semua pihak jang bergerak dibidang ekspor.
2. Ketentuan diatas harus didjadikan landasan dalam pelaksanaan Crash Program Ekspor.
3. Demi untuk suksesnja Crash Program Ekspor tersebut hendaknja ketentuan dalam rentjana pelaksanaan Crash Program Ekspor dilaksanakan dengan tjara jang tjermat dan sebaik-baiknja.

K E E N A M :

Dalam rangka Team Crash Program Ekspor instansi lainnja tidak diizinkan mengambil tindakan langsung tanpa izin dari Team Ekspor Daerah jang bersangkutan.

K E T U D J U H :

Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkanja.

Dikeluarkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 11 Agustus 1965

**KOMANDO TERTINGGI
OPERASI EKONOMI
a.n WAKIL PANGLIMA BESAR
MENTERI/SEKRETARIS UMUM**

— Drs A. SOEKENDRO —

BRIG. DJEN. TNI.

Varia berita singkat:

Ekonomi/Perdagangan Dalam Negeri

1. Production Sharing.

Wakil Perdana Menteri I Dr H. Subandrio dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Menteri Urusan Production Sharing dengan tiga buah surat Keputusannya telah menyetujui tiga buah kontrak atas kerdjasama kredit Production Sharing, yaitu:

- a. Rice Bran Oil Extraction Plant di Djember (Djawa Timur), antara P.T. BISON, Malang, dengan Deutscher Innen und Aushandel Chemiausrustungen, Berlin (Republik Demokrasi Jerman);
- b. Pabrik Minjak Kelapa di Bitung (Sulawesi Utara), antara P.T. BISON, Malang, dengan Deutscher Innen und Aushandel Chemiausrustungen, Berlin (R.D.D.);
- c. Proyek penambangan kaju dan industri kaju di Kalimantan Selatan, antara P.T. Memperkembangkan Ekonomi Indonesia Ltd. (P.T. INDECO Ltd.) di Djakarta dengan Korea SUDECO (R.R.D.K.).

Ketiga kontrak tersebut meliputi jumlah lebih kurang US\$ 18 djuta. (Antara).

2. Nilai perbandingan rupiah Irian Barat.

Dengan Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral tanggal 6 Agustus 1965 No. Kep. 67/UBS/65 ditetapkan nilai perbandingan satuan uang Rupiah Irian Barat (IB Rp) terhadap satuan uang rupiah yang berlaku diwilayah Republik Indonesia lainnya, yaitu IB Rp. 1,— (satu rupiah Irian Barat) sama dengan Rp. 500,— (limaratus rupiah). Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya laku surut hingga tanggal 1 Mei 1965.

Surat Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penghapusan karantina moneter di daerah Propinsi Irian Barat, dan mentjabut Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral tanggal 24 April 1963 No. 7/63/Kep./MUBS/G.

3. Para Pembantu Menteri Perindustrian Maritim.

- a. Komodor Laut Suwandi, sebagai pedjabat Pembantu Urusan Administrasi/Organisasi.
- b. Wasono N.A., sebagai pedjabat Pembantu Menteri Urusan Industri.
- c. Ir Tabiat, sebagai pedjabat Pembantu Menteri Urusan Proyek-Projek.

Demikian ditetapkan oleh Menteri Perindustrian Maritim dalam Surat Keputusannya tanggal 31 Djuli 1965.

4. Lapangan kerdja dan tugas Departemen Perindustrian Maritim.

Lapangan kerdja Departemen Perindustrian Maritim, antara lain sebagai berikut:

- (1) Merentjanakan, melaksanakan, mengawasi, membimbing, membina dan mengembangkan:

- a) penjelidikan bangunan kendaraan air baik jang umum maupun jang khusus dalam arti jang seluas-luasnya (diatas, dipermukaan, dan didalam air), alat² penggerak dan alat pelengkapnja dan alat-alat perlengkapan air lainnya termasuk perlengkapan-perengkapan jang diperlukan untuk pelaksanaan penjelidikan dan alat-alat untuk pemeliharaannya;

- b) pemeliharaan dan sebagainya daripada kendaraan air baik jang umum maupun khusus dalam arti seluas-luasnya (diatas, dipermukaan dan didalam air), alat-alat penggerak dan perlengkapannya serta alat-alat perlengkapan air lainnya jang diperlukan untuk pelaksanaan kelajak-gunaan dan penambahan kebutuhan akan alat-alat tersebut, baik didalam maupun diluar negeri;

- c) Proyek-proyek perluasan jang urgen dari unit-unit produksi jang ada, proyek-proyek jang sedang dibangun, demikian pula proyek-proyek baru jang sangat diperlukan guna melengkapi dan menambah daya produksi Industri Maritim jang antara lain mentjabut:

pabrik marine-paint, zatasam, carbide, kawatlas, mesin-mesin utama, mesin-mesin pelengkap, alat-alat nautica, tali-temali dan sebagainya; serta mengkoordinir industri pelengkapnja termasuk penetapan tempat proyek (site).

- (2) Mengumpulkan dan mengolah data-data dibidang Industri Maritim dan menjesuaikan policy dengan data-data tersebut dalam pelaksanaannya.

- (3) Membimbing, membina dan mengawasi aktivita Industri Maritim umumnya, baik Perusahaan-Perusahaan Negara, Swasta maupun Tjampuran dalam melaksanakan produksinja, hingga mentjapai produksi optimum dalam djangka pendek untuk kemudian ditingkatkan mendjadi maksimum dengan djalan diusahakannja penggunaan kapasitas unit-unit tersebut setjara menjeluruh.
- (4) Merentjanakan dan melaksanakan pembuatan/prototype dari pada kendaraan air beserta perlengkapannja menurut kebutuhan setjara massa-produksi.

5. Produksi ikan kering di Kalimantan Timur.

Produksi ikan didaerah Kalimantan Timur jang pada tahun-tahun jang lampau mengalami kemerosotan dan hanja mentjapai 3.000 ton ikan kering, kini telah dapat ditingkatkan mendjadi 5.000 ton, bahkan untuk tahun-tahun jang akan datang, diharapkan produksinja mentjapai 10.000 ton.

6. Serat tumbuh-tumbuhan. (Serat kaju Allamanda, Nipah, Tarok).

Allamanda (*allamanda Chathartica*) jang banjak tumbuh dan merupakan tanaman penghias dikebun-kebun di Indonesia, setelah melalui prosesing kimia kajunja didjadikan bubur (pulp), ternjata dapat dibuat kertastulis dan hardbord.

Kaju pohon Tarok (*Artocarpus*) dapat didjadikan bahan baku bagi kertas dan hardboard. Kulit batangnja untuk karung guni, kulit tiruan, tekstil dan kertas.

Pohon nipah (*Fructicans*) seratnya jang kasar dapat didjadikan kertas, serat jang halus untuk tekstil dan penutup tjelah-tjelah antara sebilah papan jang lain pada dinding sebuah kapal.

Demikian a.l. diumumkan oleh Menteri Perindustrian Dasar Hadi Thajeb kepada para wartawan ibukota mengenai penemuan — tersebut diatas.

7. P.N. Pos dan Giro dan P.N. Telekomunikasi.

P.N. Pos dan Telekomunikasi telah dibubarkan dan diganti mendjadi:

- a. P.N. Pos dan Giro diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1965; mengambil alih segala hak dan kewadajiban, perlengkapan dan kekajaan serta usaha P.N. Pos & Telekomunikasi dibidang pos dan giro.

- b. P.N. Telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1965; mengambil alih segala hak dan kewadajiban dan perlengkapan dan kekajaan serta usaha dibidang telekomunikasi.

8. Pola Pembangunan 3 tahun Departemen Kehutanan.

Pola Pembangunan 3 Tahun bidang kehutanan telah selesai disusun oleh Badan Perentjanaan dan Penelitian Departemen Kehutanan (BAPPERDEP), jang terdiri dari 5 projek pokok Ambeg Paramarta dan 6 projek-projek Komplementair. Sebagai poros projek ialah: Pembukaan industri djangkapendek, baik jang menggunakan investasi devisa maupun tidak, serta projek-projek untuk menghasilkan devisa, antara lain: industri projek logging (penglondongan kaju), minjak kaju putih, lak, gondorukem; integrated-woodindustry seperti penggergajian kaju; veneer, wood-flooring, praefabicate-houses, ulat sutra, rayon dan pulp. Kesemuanya itu pada dasarnya telah mulai eksploitasinja, dan kini ditingkatkan produksinja.

9. Hubungan Teleks Indonesia-Djepang.

Tanggal 9 Agustus 1965 hubungan teleks internasional antara Indonesia dengan Djepang telah diresmikan oleh Menteri Perhubungan Darat & PTP Letnan Djendral Hidajat dengan mengadakan pertukaran pembijtaraan dengan Menteri Postel Djepang.

Dapat ditambahkan bahwa teleks nasional telah dibuka pada tanggal 4 Djanuari 1966.

Dengan dibukanya hubungan teleks internasional tersebut diatas, berarti bahwa setia langganan teleks dapat mengirimkan telegramnja dari pesawat teleksnja sendiri.

10. Perwakilan P.N. Nitour di Luar Negeri.

Dengan Surat Keputusan Direktur Utam P.N. Nitour telah ditetapkan pembukaan Indonesian Tourist Sales Promotion Office/Perwakilan P.N. NITOUR di luar negeri dalam wilayah-wilayah:

- a. Untuk Afrika dan Eropa bertempat kedukaan di Amsterdam,
- b. Untuk Asia berkedudukan di Tokyo, dan
- c. Untuk Amerika Utara, Amerika Tengah dan Amerika Latin berkedudukan di Ottawa.

Keputusan ini antara lain ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa perlu intensifikasi offensif promosi pendjualan kepariwisataan dalam pasar-pasar dunia dalam rangka usaha mengisi kerangka kedua dan ketiga tudju Revolusi Indonesia.

PENGUMUMAN-PENGUMUMAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI/URUSAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

SYARAT-SYARAT SEBAGAI PRODUSEN IMPORTIR

Sehubungan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. Keo. 57/UBS/65, dimana menggunakan istilah „Produsen Importir”, maka memandang perlu untuk merumuskan dan menetapkan kriteria-kriteria tertentu tentang norma-norma agar suatu badan-usaha dapat diakui sebagai „Produsen Importir” sebagai berikut:

Harus memiliki izin-usaha dagang-dari Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri;

Harus memiliki izin usaha dari Departemen-Departemen yang bersangkutan menurut kegiatan usahanya;

Memenuhi syarat-syarat untuk pengakuan sebagai importir;

Bahan-bahan impor yang dibutuhkan dalam produksi dari unit produksi setahunnya bernilai tidak kurang dari US Dollar 250.000.—;

Perusahaan yang bersangkutan dapat memberi nafkah kepada sekurang-kurangnya 50 (limapuluh orang buruh).

Adapun bagi perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi syarat (d) diatas, maka kebutuhan bahan-bahan untuk proses produksinya dapat melakukan pembelannya melalui Perusahaan Raga Negara.

Pengakuan tersebut diatas adalah bersifat sementara. Pendjelasan selanjutnya dapat diperoleh dari Direktorat Marketing dan Research.

PENGURUS LEMBAGA KAPOK

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan Luar Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 105/MPDN/65 tanggal 6 Agustus, tentang Tugas dan Susunan Lembaga Kapok, maka dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 106/MPDN/65 tertanggal 6 Agustus 1965, telah ditetapkan anggota-anggota pengurus Lembaga Kapok sebagai berikut:

Moertedjo S.H. — Dari Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri, sebagai Anggota merangkap Ketua;

- | | |
|-----------------------|---|
| 2. A. Rivai, | — Wakil dari Direktorat Ekspor, sebagai anggota; |
| 3. Soeprapto, | — Wakil dari Departemen Pertanian, sebagai anggota; |
| 4. Ir Soegito, | — Wakil dari Kompartimen Perindustrian Rakjat, sebagai anggota; |
| 5. Soekirman, | — Wakil dari Departemen Koperasi, sebagai anggota; |
| 6. Drs Soewarno, | — Wakil dari Departemen Dalam Negeri, sebagai anggota; |
| 7. Soekardi Djacaria, | — Direktur Utama dari P.T. Kapok Indonesia, sebagai anggota; |
| 8. Drs Sjaaf Muchtar, | — Wakil dari Direktorat Pengadaan dan Penjaluran, sebagai anggota; |
| 9. Ir Soerojo, | — Wakil dari Direktorat Marketing dan Research, sebagai anggota merangkap Sekretaris. |

3. TUGAS DAN SUSUNAN TJABANG-TJABANG LEMBAGA TEMBAKAU.

Menimbang bahwa dalam rangka reorganisasi Lembaga Tembakau, perlu ditetapkan pula tugas dan susunan dari tjabang-tjabangnja yang ada di daerah-daerah, maka dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 0103/MPDN/SK/65 tanggal 6 Agustus 1965, ditetapkan Tugas dan Susunan dari Tjabang-Tjabang Lembaga Tembakau sebagai berikut:

1. Tjabang-tjabang Lembaga Tembakau merupakan badan-badan pelaksana daripada tugas-tugas Lembaga Tembakau di daerah-daerah pertembakauan;
2. Tugas dan kegiatan daripada Tjabang-Tjabang adalah antara lain:
 - a. menjelenggarakan research dalam bidang mempertinggi produksi tembakau a.l.

b:bit unggul, pemberantasan hama/penjakit termasuk kemungkinan-kemungkinan memperluas areal terbakau;

- b. Memberikan penerangan-penerangan yang seintensif-intensifnya kepada para petani tembakau pada khususnya mengenai usaha-usaha untuk mempertinggi produksi tembakau dengan tjara antara lain menerbitkan pamphlets/leaflets dan pertunjukkan film mengenai tjara-tjara bertjotjok tanam, memberantas hama/penjakit, tjara-tjara memelihara dan mempertinggi kwalita;
 - c. dalam rangka ekonomi terpinpin menjelenggarakan pula kanalisasi hasil tembakau dari sipetani sampai keaparat-aparat ekspor;
 - d. menjelenggarakan pengudjian tembakau sebelum keluar dari pabean Indonesia;
 - e. melakukan pengawasan funigasi dalam rangka pemberantasan hama Lasioderma;
 - f. melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan lainnya ditetapkan oleh Dewan Pengurus Lembaga Tembakau.
3. Tjabang-Tjabang Lembaga Tembakau tersebut yang dipimp'n oleh seorang Kepala Tjabang, diadakan untuk Daerah;

- a. Jawa Timur I : berkedudukan di Surabaya yang meliputi daerah pertembakauan Daerah Tingkat I Jawa Timur, ketjuali daerah yang tersebut dalam sub b dibawah ini;
- b. Jawa Timur II : berkedudukan di Djember dan meliputi daerah pertembakauan Daerah Tingkat II Djember, Bondowoso, Situbondo, Banjuwangi, Probolinggo dan Lumadjang;
- c. Jawa Tengah : berkedudukan di Surakarta meliputi daerah Jawa Tengah;
- d. Sumatera Utara : berkedudukan di Medan, meliputi daerah Sumatera Utara.

4. PENETAPAN KEPALA-KEPALA TJABANG LEMBAGA TEMBAKAU.

Dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 0104/MPDN/SK/65 tanggal 6 Agustus dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya telah ditetapkan Kepala-kepala Tjabang Lembaga Tembakau sebagai berikut :

- a. Jawa Timur I di Surabaya : Ir C.M. Hariwardjono;

- b. Jawa Timur II di Djember : Ir Ngakan Putu Ngrah Sutedja Gedong Arta;
- c. Jawa Tengah di Surakarta : Ir Sasdarjono;
- d. Sumatera Utara di Medan : Moh. Soerowo.

Surat Keputusan tersebut ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 1965.

5. PERUBAHAN TARIP RETRIBUSI :

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri tanggal 23 Djuli 1965 No. 099/MPDN/SK/65 dan berlaku surut hingga 1 Djaniuari 1965 telah ditetapkan perubahan tarip uang retribusi pendaftaran Perusahaan-perusahaan Perdagangan, besarnya sebagai berikut :

- a. **Perusahaan Asing** sebanjak Rp. 5.500,— setahunnja;
- b. **Perusahaan Nasional :**
 1. Pedagang Besar sebanjak Rp 5.000,— setahunnja;
 2. Pedagang Perantara sebanjak Rp 3.000,— setahunnja;
 3. Pedagang Ketjil/Etjeran sebanjak Rp 1.000,—/setahunnja.

Tjara pembayaran Uang Retribusi tersebut dalam rangka pelaksanaan pendaftaran perusahaan **tetap berlaku** seperti biasa sesuai dengan Pengumuman-pengumuman DPDN. tanggal 29 Agustus 1965 No. 3415/H-I-O/DPDN/P dan tanggal 3 Pebruari 1959 No. 518/H-I-O/DPDN/P serta tanggal 26 Nopember 1959 No. 5686/H-II-2/DPDN.

Sebagai akibat perubahan tarip tersebut yang berlaku surut mulai tanggal 1 Djaniuari 1965 maka untuk tahun 1965 terdapat selisih uang retribusi perusahaan dagang yang belum dibayar oleh pengusaha. Selisih tersebut paling lambat sudah disetor pada **tanggal 1 Desember 1965.**

Karena pembayaran retribusi adalah satu syarat pokok untuk memperoleh Surat Izin Usaha Dagang, diandjurkan agar pembayaran/penjettoran selisih tersebut dipenuhi secepat mungkin.

Pendjelasan-pendjelasan selanjutnja dapat diberikan oleh Perwakilan-perwakilan Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri di ibukota Daerah Tingkat I (Propinsi) yang bersangkutan/D.C.I. Djakarta Raya/Daerah Istimewa Jogjakarta, serta kantor-kantor Tjabang Direktorat Pengadaan dan Penjaluran di daerah-daerah (bekas KPDTIPDN).

6. LEMBAGA PENJALURAN PERUSAHAAN

Dengan Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri tanggal 23 Djuli 1965 No. 097/MPDN/SK/65 telah ditetapkan penempatan Lembaga Penjaluran Perdagangan dibawah kewenangan dan tanggungjawab Direktorat Pengadaan dan Penjaluran Departemen Perdagangan Dalam Negeri

Pekerjaan research dibidang perdagangan Lembaga tersebut diserahkan kepada dan menjadi tugas Direktorat Marketing dan Research.

Administrasi keuangan dan perlengkapan dari Lembaga tersebut ditugaskan kepada Direktorat Administrasi Departemen Perdagangan Dalam Negeri.

Pelaksanaan keputusan ini dan peraturan-peraturan selanjutnya sebagai akibat dari keputusan ini diserahkan kepada Kepala Direktorat Pengadaan dan Penjaluran tersebut.

Dalam masa peralihan aparatut Lembaga Penjaluran Perdagangan bekerja sebagaimana biasa dibawah pimpinan Kepala Direktorat Pengadaan dan Penjaluran atau Kuasa yang ditunjuk olehnya sampai ada ketentuan lebih lanjut.

DIREKTUR UTAMA DAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS TEMINDO GmbH.

Dengan Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri tanggal 20 Djuli 1965 No. 0112/MPLN/SK/65 Tahun 1965 telah ditetapkan

pengangkatan AMBIYAH HADINOTO sebagai Direktur Utama TEMINDO GmbH dengan kedudukan di Bremen.

Selanjutnya telah ditetapkan pula susunan Dewan Komisaris TEMINDO GmbH (Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri tanggal 20 Djuli 1965 No. 0113/7/MPLN/SK/65 Tahun 1965) sebagai berikut :

- a. Moch. Joesoef dari P.T. Gading Mas Djakarta;
- b. Ali Rachmat dari Konsulat Djendral R.I. di Hamburg;
- c. Bachtarudin dari Bank Indonesia Amsterdam.

8. PINDAH ALAMAT.

Sedjak tanggal 15 Agustus J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri DRIGDJEN ACHMAD JUSUF telah pindah rumah dari alamat lama Djalan Tjipinang Tjempedak IV/2 DJAKARTA, kealamat yang baru : Djalan Patimura II Blok K No. 13 Kebajoran Baru Djakarta.—

sambungan dari hal. 4

Jangan ragu², djangan mandek, berdjalanlah terus atas dasar Landasan itu, untuk mendapatkan hasil² yang lebih besar lagi”.

(Dari „Tahun Kemenangan” 17 Agustus 1962).

* * *

— „Karena itu, hai seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu ! Djangan mundur, djangan berhenti, tetap derapkanlah kakimu dimuka bumi ! Djikalau ada kalanja saudara² merasa bingung, djikalau ada kalanja saudara² hampir bertakut, djikalau ada kalanja saudara² kurang mengerti djalannya Revolusi kita yang memang datang² seperti bahtera dilautan badai yang mengancam ini, — kembalilah kepada sumber Amanat dan Penderitaan Rakjat kita yang congruent dengan Social Conscience of Man itu. Kembalilah kepada sumber kekuatan, sebab disanalah saudara akan menemukan kembali Rilynja Revolusi !

(Dari „Genta Suara Revolusi Indonesia” 17 Agustus 1963).

— „Tiada Revolusi dapat benar² bergelora, kalau rakjatnja tidak mendjalankan Revolusi itu dengan anggapan Romantik. Tiada Revolusi dapat mempertahankan djiwanja, djikalau Rakjatnja tidak bisa menerima serangan musuh sebagai romantiknja Revolusi, dan menangkis serangan musuh dan menghantam hantjur-lebur kepada musuh itu sebagai romantiknja Revolusi”.

— „Rasa romantik-perjuangan adalah sumber kekuatan abadi daripada Perjuangan. Oerkracht daripada perjuangan !”.

(Dari „Tahun Vivere Pericoloso” 17 Agustus 1964).

(ANTARA)

PENDJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 14 TAHUN 1965 TENTANG PERKOPERASIAN.

I. U M U M

Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Djuli 1959, dan dengan ditetapkannya Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) dan Amanat Pembangunan Presiden (A.P.P.) sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan oleh M.P.R.S. dan ditetapkannya Deklarasi Ekonomi sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia, menuntut setjara mutlak perubahan fungsi dari segala lembaga kemasyarakatan, chususnja gerakan koperasi, untuk disesuaikan dengan Haluan Negara maupun Haluan Pembangunan serta strategi dasar ekonomi tersebut.

Sesuai dengan prinsip tersebut diatas serta pertumbuhan koperasi sendiri dalam kehidupan ekonomi Indonesia, perlu dikeluarkan Undang-Undang baru dalam bidang perkoperasian guna menjempurnakan Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi.

Undang-Undang yang baru ini dinamakan Undang-Undang tentang Perkoperasian yang mengatur segala sesuatu yang menjangkut kehidupan koperasi yang berintikan pola koperasi dibidang landasan idiil/haluan, organisasi dan usaha.

Agar tidak terdapat kekakuan dalam mengikuti gerak dan dinamikanja Revolusi Indonesia, Undang-Undang ini hanya mengatur soal-soal pokok perkoperasian yang intisarinja sebagai berikut :

A. Dibidang landasan idiil/haluan perkoperasian dipergunakan pangkal tolak pemikiran, bahwa pola koperasi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari doktrin Revolusi/dasar falsafah Negara, Pantjasila.

Dalam tahap nasional demokratis sekarang ini, peranan gerakan koperasi Indonesia dalam melaksanakan tugasnja dibidang perekonomian ber-sama³ dengan usaha swasta bukan koperasi, diarahkan pertamanya untuk memperkuat ekonomi sektor Negara yang memegang posisi memimpin.

Agar tidak timbul kontradiksi yang tidak atau kurang pokok dan dapat menggalang segenap potensi yang progresif untuk dapat menyelesaikan tahap nasional demokratis, jaitu mengkikis-habis sisa-sisa imperialisme, kolonialisme dan feodalisme, Pemerintah diwajibkan mengatur dan menetapkan pola kerdjasama antara koperasi dengan badan-badan usaha Negara serta badan swasta lain bukan koperasi.

Untuk menempatkan gerakan koperasi sebagai gerakan rakjat revolusioner dibidang ekonomi dan sebagai salah satu alat Revolusi, maka gerakan koperasi harus mengintegrasikan diri dengan seluruh gerakan revolusioner lainnja, terutama dengan buruh, tani/nelayan sebagai sokoguru Revolusi yang sangat menderita akibat penghisapan dan penindasan dari kolonialisme, feodalisme dan membersihkan semua elemen-elemen partai/organisasi terlarang dari tubuh koperasi.

Ini baru mungkin terlaksana djika konsepsi, struktur, aktivitas dari alat-alat pembinaan serta alat perlengkapan organisasi koperasi mentjerminkan kegotong-rojongan progressif revolusioner berporoskan NASAKOM dan ditingkatkan usahanja dibidang produksi dan distribusi.

B. Dibidang organisasi ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok tentang keanggotaan, alat-alat perlengkapan organisasi, djenis-djenis koperasi, penentuan MUNASKOP sebagai lembaga tertinggi dari gerakan koperasi, pembentukan kesatuan organisasi koperasi seluruh Indonesia yang dinamakan Gerakan Koperasi Indonesia sebagai alat pemersatu dan pengawasan dari segala djenis koperasi serta sebagai pelaksana keputusan-keputusan MUNASKOP.

Ketentuan-ketentuan pokok dibidang organisasi tersebut djuga diarahkan untuk dapat melaksanakan

fungsi koperasi sebagai organisasi ekonomi maupun sebagai salah satu alat revolusi.

C. Dibidang usaha dimuat pula ketentuan pokok tentang dasar aktivitas ekonomi koperasi agar koperasi tidak tenggelam dalam soal-soal materi yang dapat mengakibatkan koperasi bersarang dalam alam kapitalisme akan tetapi diarahkan agar dalam tahap nasional demokratis sekarang ini dapat mengkombinasikan setjara tepat antara kegiatan-kegiatan yang bersifat tambal sulam (reformactie) dan kegiatan-kegiatan yang bersifat revolusioner (doelsactie).

Untuk mendjamin adanya kesatuan kebidjaksanaan dan berkembangnja koperasi setjara sehat, semua instansi Pemerintah, badan-badan usaha Negara baik di Pusat maupun Daerah, diwajibkan melindungi dan mendorong pertumbuhan koperasi menurut pola yang telah ditetapkan oleh Menteri yang diserahi urusan perkoperasian.

Unit-unit ekonomi koperasi oleh M.P.R.S. dalam Ketetapanja No. VI/M.P.R.S./1965 pasal 1 telah enjatakan sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang berjaya dan merupakan modal serta potensi riil untuk melaksanakan prinsip berdiri diatas kaki sendiri dibidang ekonomi.

Untuk memperkembangkan potensi tersebut Pemerintah wadajib mengambil peranan yang aktif.

II. PASAL DEMI PASAL.

B A B I.

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Tjukup djelas.

B A B II.

LANDASAN IDIIL KOPERASI

Pasal 2.

Apa yang ditentukan mendjadi landasan idiil koperasi dalam Undang-Undang ini pada hakekatnja sesuai dengan djiwa dari Ketetapan M.P.R.S., oleh karena Undang-Undang Dasar 1945, Manipol/Usdek, Amanat Pembangunan Presiden, Dekon dan semua pedoman pelaksanaan Manipol adalah satu kesatuan konsepsi yang tidak dapat dipisahkan.

Kesemuanja bersumber pada Pantjasila.

B A B III.

PENGERTIAN DAN FUNGSI, AZAS DAN DASAR BERKOPERASI

Pasal 3.

Dalam merumuskan pengertian dan fungsi koperasi Indonesia pada pasal ini ditegaskan bahwa koperasi Indonesia mempunyai dua wadjah yakni sebagai „organisasi ekonomi” dan sebagai „alat Revolusi”. Bidang atau wilayah koperasi terutama sekali adalah wilayah Ekonomi. Sebagai alat revolusi, koperasi Indonesia mempunyai fungsi sebagai tempat persemiaan insan masyarakat dan merupakan wahana menudju kealam Sosialisme.

Koperasi Indonesia dan Sosialisme Indonesia tidak dapat dipisah-pisahkan, sebab Sosialisme Indonesia adalah organwanja koperasi. Dunia Sosialisme adalah dunia koperasi masyarakat Sosialisme adalah masyarakat koperasi.

Oleh karena itu fungsi koperasi dalam Revolusi Indonesia adalah penting sekali, karena tudjuan Revolusi Indonesia adalah djelas, jaitu masyarakat adil dan makmur masyarakat tanpa penghisapan oleh manusia atas manusia masyarakat Sosialisme Indonesia.

Mentjapai Sosialisme harus dilaksanakan setjara revolusioner. oleh karena Sosialisme Indonesia an sich adalah hasil dari tindakan revolusioner.

Oleh karena itu koperasi Indonesia tidak boleh tidak harus bersifat revolusioner.

Pasal 4.

Pasal ini menegaskan perbedaan essensial antara koperasi dan badan lain yang berusaha dibidang perekonomian. Uji-tjuri khas koperasi dalam kedudukannya sebagai organisasi ekonomi dan alat Revolusi tertjermin dalam azas dan dasar bekerdjanja sebagaimana terperintji dibawah ini :

1. Azas gotong-rojong, kekeluargaan dan swadaja adalah azas mutlak dalam koperasi, oleh karena disini tertjermin hubungan koperasi dengan landasan idiilnja (Pantjasila). Penedjawatahan (perwujudan) adjaran Pantjasila (Gotong-rojong) dalam bidang sosial ekonomi yang paling tepat ialah dalam organisasi koperasi sebagaimana dirumuskan dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 beserta pendjelasannya.

2. Disamping memenuhi keperluan serta meningkatkan kesedjahteraan anggota, koperasi sesuai dengan azasnya djuga berkewajiban ikut serta meningkatkan kesedjahteraan masyarakat seluruhnja. Dengan demikian koperasi benar-benar dapat merupakan tempat persemaian insan masyarakat, sesuai dengan ketentuan pasal 3.

Tjukup djelas.

3. Azas sukarela dalam sistim keanggotaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang masuk menjadi anggota koperasi harus dengan kesadaran. Dilain pihak kesukarelaan ini tidak boleh dipergunakan untuk merusak kehidupan koperasi. Karenanja penggunaan azas ini masih harus diserasikan dengan azas demokrasi tertimpin dan ekonomi tertimpin dalam pengertian bahwa setiap orang harus tunduk pada Pola yang sudah digariskan dalam Haluan Negara dan Haluan Pembangunan.

Kewajiban, hak serta kepentingan yang sama dari pada anggota dimaksudkan untuk menjjamin adanya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

Ketentuan bahwa keanggotaan tidak dapat dipindahkan dengan djalannya apapun djuga, didasarkan atas pemikiran bahwa koperasi bukan konsentrasi modal. Konkritnja simpanan pokok, simpanan wadajib dan lain-lain simpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, 33 sama sekali tidak dapat diartikan sebagai saham pada N.V. dan sebagainya.

Kekuasaan tertinggi yang berada dalam rapat anggota mentjerminkan azas demokrasi dalam koperasi. Keputusan rapat anggota yang didasarkan pada musjawarah untuk mufakat adalah suatu sistim yang melekat pada azas demokrasi tertimpin sebagaimana dirumuskan oleh Ketetapan M.P.R.S. No. VIII/MPRS/1965.

Dasar bekerdja ini adalah bentuk konkrit dari pada azas gotong-rojong.

Sifat terbuka dari pada koperasi adalah untuk menjjamin pengawasan masyarakat (social controle) terhadap kegiatan usaha koperasi.

Pasal 5.

Sesuai dengan pendjelasan umum, perkoperasian (pola operasi) tidak dapat dipisahkan dari masalah Revolusi dan umumnya (doktrin Revolusi), sehingga tantangan-tantangan dari gerakan koperasi hakekatnja merupakan tantangan dari pada Revolusi itu sendiri.

Pengalaman-pengalaman perdjongan kita dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, menunjukkan kerusan objektif adanya persatuan dan kesatuan segenap tensi dan kekuatan rakyat yang progresif revolusioner rporos NASAKOM, yang pelaksanaannya diatur dengan gotong-rojongan antara Pemerintah dengan kekuatan NASAKOM.

B A B IV.

PERANAN GERAKAN KOPERASI DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN DAN EKONOMI TERPIMPIN.

Pasal 6.

Tjukup djelas.

Pasal 7.

Untuk menjjamin azas demokrasi tertimpin dan ekonomi tertimpin kebidjaksanaan perkoperasian ditetapkan oleh Pemerintah.

B A B V.

KEANGGATAAN DAN ORGANISASI

Bagian 1.

Keanggotaan.

Pasal 8.

Tjukup djelas.

Pasal 9.

Ajat (1) pasal ini mengatur sjarat-sjarat keanggotaan bagi koperasi primer.

Diantara sjarat-sjarat itu (huruf c) menegaskan bahwa walaupun pada dasarnya setiap warga Negara Indonesia berhak untuk menjadi anggota koperasi, tetapi karena koperasi adalah sebagai salah satu alat Revolusi, maka adalah wadjar kalau keanggotaannya harus terdiri dari kekuatan-kekuatan progresif revolusioner.

Oleh karena itu, keanggotaan koperasi harus berorientasikan kepada buruh, tani/nelayan dan golongan-golongan lain yang lemah kedudukan ekonominya, termasuk produsen ketjil, warga angkatan bersendjata dan pegawai Negeri.

Untuk mentjakup pengertian itu, dalam Undang-Undang ini dipergunakan istilah „rakyat pekerja dan produsen ketjil”.

Pasal 10.

Tjukup djelas.

Pasal 11 dan 12

Adanja kewajiban serta hak seperti tertantum dalam pasal 11 dan 12 Undang-Undang ini adalah untuk mendorong peranan yang aktif dari anggota baik dalam perrentjanaaan, pelaksanaan maupun pengawasan sehingga sifat terbuka menurut ketentuan pasal 4 huruf j dapat berdjalan sebagaimana mestinja.

Bagian 2.

Alat-alat perlengkapan organisasi koperasi.

Pasal 13.

Tjukup djelas.

Pasal 14.

Tidak mengurangi ketentuan bahwa rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, dan untuk menjjamin adanya kesatuan dan keserasian antara tingkat-tinggi koperasi serta djenis yang satu dengan yang lain sebagaimana digariskan dalam ketentuan pasal 22, maka kekuasaan tertinggi dari pada rapat anggota untuk masing-masing tingkatan itu tidak boleh disalahgunakan untuk melanggar keputusan rapat anggota koperasi yang lebih atas, Gerakan Koperasi Indonesia, MUNASKOP dan kebidjaksanaan pokok yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Maksud ketentuan ajat (2) dan (3) pasal ini ialah untuk meninggalkan kebiasaan yang terdapat dalam praktek-praktek demokrasi liberal yang menondjolkannya adanya hak suara dan pengambilan suara dan menetapkan sebagai gantinya prinsip musjawarah untuk mufakat menurut norma-norma yang telah digariskan dalam Ketetapan M.P.R.S. No. VIII/MPRS/1965.

Dalam hubungan ini lihat djuga pendjelasan pasal 4 huruf h.

Pasal 15.

Pasal ini mengatur dalam ajat (1) kedudukan serta tugas pengurus.

Pengurus sebagai badan pelaksana dari pada rapat anggota bertugas melakukan hal-hal yang diputuskan dalam rapat anggota maupun yang tersimpul dalam ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Ajat (2) dan (3) mengatur siapa yang memilih dan siapa yang dapat dipilih atau diangkat dimana ditegaskan bahwa pada dasarnya yang dapat dipilih sebagai pengurus ialah anggota koperasi.

Mengangkat seseorang menjadi pengurus koperasi bukan anggota koperasi dimungkinkan, tetapi dibatasi jumlahnya tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ jumlah anggota pengurus seluruhnya.

Hal ini bertalian dengan adanya kemungkinan bahwa anggota koperasi yang berhak dipilih tidak selamanya memiliki ketrampilan/keahlian yang diperlukan untuk memimpin koperasi yang senantiasa berkembang atau tidak dapat mentjermin kekuatan progresif revolusioner berporoskan NASAKOM seperti termaksud dalam pasal 5.

Syarat-syarat untuk dipilih atau diangkat sebagai pengurus, baik yang dari anggota maupun bukan, seperti yang ditentukan dalam ajat (4), adalah untuk menjamin disatu pihak kemampuan teknis untuk melaksanakan pimpinan koperasi mengingat bahwa wilayah koperasi terutama sekali adalah wilayah ekonomi, dilain pihak untuk menjamin progresivitas pimpinan koperasi.

Dalam pasal 39 ditentukan bahwa koperasi yang didirikan menurut ketentuan Undang-Undang ini, adalah badan hukum. Seperti halnya dengan lain-lain badan hukum untuk dapat mengadakan tindakan-tindakan hukum, badan hukum koperasi perlu dipersonifikasikan (ditentukan siapa-siapa yang dapat bertindak untuk dan atas nama koperasi).

Ajat (5) inilah yang menegaskan bahwa personifikasi badan hukum koperasi itu adalah pengurus. Dengan demikian tersimpul pengertian bahwa tindakan-tindakan pengurus yang dilakukan untuk melakukan tugasnya termaksud dalam ajat (1) mentjerminkan tindakan-tindakan koperasi.

Mengingat pentingnja peranan pengurus seperti tersebut diatas wadjar apabila pengurus bertanggung djawab kepada rapat anggota yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Pasal 16.

Badan pemeriksa mempunyai kedudukan yang sederajat dengan pengurus, dilihat dari sudut bahwa badan pemeriksa maupun pengurus dibentuk oleh rapat anggota dan bertanggung djawab kepada rapat anggota, akan tetapi berbeda dalam tugas maupun kewenangannya.

Badan pemeriksa tidak hanya mempunyai wewenang dalam mengadakan pemeriksaan atas pekerjaan pengurus akan tetapi juga atas seluruh usaha koperasi termasuk kewadjan serta usaha dari pada anggota yang bersangkutan dengan usaha koperasi.

Pasal 17.

Tjukup djelas.

Bagian 3.

Kedudukan Penasehat.

Pasal 18.

Tjukup djelas.

Bagian 4.

Organisasi Koperasi.

Pasal 19.

Tjukup djelas.

Pasal 20.

Djumlah anggota minimal (sedikit-dikitnja) bagi koperasi primer, pusat koperasi, gabungan koperasi, induk koperasi ditentukan dalam pasal ini adalah suatu djumlah yang dipandang wadjar untuk menjamin prinsip keseimbangan pembangunan koperasi dari bawah dan dari atas.

Penentuan minimum keanggotaan dimaksud untuk menjamin prinsip pembangunan dari bawah, sedang penentuan djumlah minimum yang tidak begitu besar memberikan kemungkinan agar rakjat dibimbing setjara aktif

oleh tingkat koperasi yang teratas, oleh Gerakan Koperasi Indonesia maupun oleh Pemerintah kearah kesadaran ber-koperasi.

Namun demikian dalam keadaan luar biasa sesuai dengan ketentuan ajat (5) pasal ini, atas pertimbangan Gerakan Koperasi Indonesia, Menteri dapat mengizinkan pendirian koperasi menjimpang dari ketentuan ajat (1) pasal ini.

Pasal 21.

Daerah kerdja koperasi yang didasarkan pada kesatuan wilayah administrasi pemerintahan, dimaksudkan untuk mengintegrasikan gerakan koperasi dengan pembangunan otonomi daerah serta untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan.

Untuk menjamin keluwesan dan mengikuti proses perkembangan masyarakat dan gerakan koperasi, penentuan daerah kerdja koperasi, baik yang didasarkan pada kesatuan wilayah administrasi pemerintahan maupun yang menjimpang dari dasar tersebut diatas termasuk kemungkinan berdirinja lebih dari 1 (satu) koperasi yang sedjenas dan setingkat dalam satu daerah kerdja, diatur oleh Menteri.

Pasal 22.

Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk mentjegah adanya tingkat-tingkat koperasi dari primer sampai dengan induk djangan sampai merupakan penambahan mata-rantai kegiatan ekonomi.

Unit ekonomi yang pokok serta merupakan basis, adalah koperasi primer. Koperasi pusat, gabungan serta induk baru melakukan suatu kegiatan ekonomi apabila koperasi tingkat bawahnja tidak mungkin melaksanakannya sendiri.

Pada prinsipnja pelaksanaan kegiatan ekonomi makin bawah makin baik.

Dalam hal suatu kegiatan ekonomi dilakukan oleh tingkat pusat, gabungan dan induk, maka harus ditjegah sekeras-kerasnja agar tidak mematkan usaha koperasi tingkat bawahnja.

Bagian 5.

Organisasi Gerakan Koperasi.

Pasal 23.

Adanya MUNASKOP sebagai lembaga tertinggi gerakan koperasi mentjerminkan bahwa gerakan koperasi merupakan suatu gerakan massa rakjat yang demokratis dan terbuka.

Sekalipun demikian, berdasarkan azas demokrasi ter-pimpin dan ekonomi ter-pimpin yang tersimpul dalam pasal 7 ajat (1), fungsi MUNASKOP tersebut harus menentukan kebidaksanaan pokok yang ditentukan oleh Pemerintah.

Selain itu MUNASKOP-pun merupakan forum untuk dapat menjimpulkan pengalaman-pengalaman sebagai bahan-bahan pertimbangan bagi Pemerintah untuk menentukan kebidaksanaannja dibidang perkoperasian.

Dari unsur-unsur peserta sebagaimana dirumuskan dalam ajat (3) pasal ini dapat didjamin adanya integrasi dengan kekuatan rakjat yang progresif revolusioner berporoskan NASAKOM serta adanya integrasi antara Pemerintah dan rakjat.

Pasal 24.

Gerakan Koperasi Indonesia adalah nama dari kesatuan organisasi dari gerakan koperasi yang bertugas melaksanakan keputusan-keputusan MUNASKOP.

Sifat organisasi adalah tunggal dan piramidal untuk menjamin kelintjahan gerak dan sifat demokratisnja.

Gerakan Koperasi Indonesia-nja sendiri beranggotakan organisasi koperasi menurut tingkat-tingkatnja. Tetapi agar mentjerminkan ketentuan pasal 5, pimpinannya terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, gerakan koperasi dan organisasi-organisasi massa.

Lapangan kegiatan Gerakan Koperasi Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam ajat (3) pasal ini, dimaksudkan

an agar badan ini memperjuangkan kepentingan gerakan koperasi sebagai keseluruhan.

Bahwa Gerakan Koperasi Indonesia tidak langsung berketimpung dalam kegiatan usaha dimaksudkan agar mempunyai kewibawaan yang cukup untuk melaksanakan fungsi sebagai faktor penggerak, pengintegrasi, mempersatu dan pengawas dari segala kegiatan koperasi.

Bagian 6.

Administrasi.

Pasal 25.

Agar pelaksanaan pengawasan atas koperasi dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat sesuai dengan ketentuan pasal 4 huruf j, serta untuk kepentingan dan kesejahteraan dan perkembangan koperasi itu sendiri, maka mutlak diperlukan adanya administrasi dan pemukiman yang teratur, menurut pola yang ditentukan oleh Menteri.

Dalam administrasi disini termasuk statistik, pengumpulan keputusan-keputusan rapat anggota, keputusan-keputusan pengurus dan lain-lain dokumen penting yang bersangkutan dengan perkembangan koperasi dibidang kebidaksanaan, organisasi maupun usaha.

B A B VI.

Bagian 1.

Dasar aktivitas ekonomi.

Pasal 26.

Penegasan dasar aktivitas ekonomi dari pada koperasi seperti yang dirumuskan dalam pasal 26 adalah suatu intraplan konkrit dari pada tujuan koperasi sebagai organisasi ekonomi, yakni untuk meringankan beban hidup serta meningkatkan kesedjahteraan dari pada anggota dan masyarakat yang lemah kedudukan ekonominya bukan untuk mencari keuntungan (tidak ada profitative).

Bagian 2.

Perusahaan Koperasi.

Pasal 27.

Adanya ketentuan bahwa koperasi dapat mendirikan dan memiliki perusahaan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal ini adalah untuk:

menjaga serta menghentikan praktek-praktek yang tidak sehat yang bertalian dengan pemilihan perusahaan oleh koperasi;

menjamin perkembangan koperasi dalam memper-tumbuhan azas swadaya (untuk berdiri diatas kaki sendiri).

Adanya syarat-syarat tersebut diatas perlu ditondjolo-kan suatu prinsip yang tersimpul dalam pasal 22, bahwa koperasi primer sampai induk merupakan satu kesatuan ekonomi yang pokok dan yang merupakan basis dari koperasi primer.

Koperasi tingkat pusat, gabungan dan induk baru melain-kan suatu kegiatan ekonomi termasuk mendirikan dan memiliki perusahaan apabila koperasi tingkat bawahnya tidak mungkin melaksanakannya sendiri, dengan tidak menutup kemungkinan beberapa koperasi setingkat set-nya bersama-sama mendirikan dan memiliki perusahaan yang bermanfaat bagi koperasi lainnya.

Pewenang Menteri tersebut dalam ayat (1) huruf b dan c mengurangi wewenang Menteri-Menteri yang lain.

Dengan ketentuan tersebut dimaksudkan agar Menteri dan instansi-instansi yang lain dalam memberikan izin dan fasilitas lainnya bagi perusahaan-perusahaan yang didirikan atau dimiliki oleh koperasi, terlebih dahulu memperhatikan syarat-syarat perkoperasian yang ditentukan oleh Menteri.

Ketentuan ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan kepastiaan dan tanggung-jawab kepada Pemerintah untuk mengatur dan menertibkan perusahaan yang kini telah dimiliki; maupun yang akan didirikan dan dimiliki oleh koperasi sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Bagian 3.

Iuran Negara dan Dana-Dana.

Pasal 28, 29 dan 30.

Dari dasar aktivitas tersebut dalam pasal 26 dapat ditarik garis yang jelas, bahwa tingkat kemajuan koperasi tidak ditentukan oleh besar ketijilnja selisih lebih koperasi termaksud dalam pasal 28 ayat (2) akan tetapi ditentukan oleh kemampuan koperasi dalam melajani kepentingan anggota dan masyarakat dengan barang serta jasa dalam kuantitas dan kualitas yang lebih baik dari pada kalau barang serta jasa diusahakan setjara perorangan.

Besar ketijilnja selisih lebih koperasi seperti termaksud dalam pasal 28 ayat (2) hanya menundjukkan tingkat efisiensi kerdja koperasi jaitu dalam bentuk beaja yang diperkirakan lebih besar dari beaja yang njata-njata dikeluarkanja.

Dielaslah bahwa pengertian keuntungan seperti yang terdjadi pada N.V., C.V. dan lain-lain organisasi bukan koperasi, tidak ada dalam koperasi.

Dengan demikian menjadi jelas pula bahwa jumlah iuran Negara, tjadangan serta dana-dana lainnya termasuk dalam pasal 28 Undang-Undang ini makin menjadi lebih ketijil apabila tjara mendjalankan usaha koperasi makin meningkat menjadi lebih baik.

Oleh karena itu, baik untuk meningkatkan penerimaan Negara maupun usaha koperasi serta untuk mengadakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat maupun revolusi dibuka kemungkinannya pada ketentuan pasal 29.

Dana-dana yang diatur dalam pasal 29 bukanlah dana-dana dari koperasinya sendiri melainkan dana-dana yang ditetapkan untuk dipenuhi oleh anggota dan masyarakat yang dilajani oleh koperasi serta yang pemungutannya dilakukan melalui koperasi.

Oleh karena itu pungutan dana/sumbangan dari anggota dan masyarakat melalui koperasi tersebut hania dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh Menteri dan dilarang bagi siapapun atau instansi manapun untuk mengadakan pungutan dana/sumbangan lain daribada yang ditentukan oleh Undang-Undang ini dan tidak menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri.

Bagian 4.

Permodalan.

Pasal 31, 32 dan 33.

Ketentuan-ketentuan pasal 31, 32 dan 33 mempunyai hubungan yang erat satu sama lain.

Apakah diartikan sebagai modal didalam koperasi tidak berbeda dengan pengertian modal dalam arti ekonomi pada umumnya.

Arti khusus pada modal koperasi dibanding dengan modal badan-badan ekonomi lainnya, ialah terletak pada dasar penjusunan dan fungsi dari pada modal koperasi tersebut.

Arti khusus dari pada modal koperasi ini bersumber pada ketentuan pasal 4 huruf a dan c yang menegaskan bahwa koperasi berazas gotong-rojong dan tidak merupakan konsentrasi modal.

Bentuk konkrit dari azas dan dasar bekerja tersebut, ialah bahwa penjusunan modal koperasi didasarkan pada azas kegotong-rojongan antara anggota. Banjak sedikitnya simpanan anggota termaksud dalam pasal 32 dan 33 Undang-Undang ini, hanya merupakan salah satu

unsur dari modal koperasi serta tidak merupakan faktor yang menentukan dalam tjara menentukan pembagian sisa lebih tersebut dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ini. Pembagian sisa lebih ditentukan oleh kerja anggauta dalam mengembangkan koperasi.

Simpanan pokok dan simpanan wadjab termaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a dan b, yang pengertiannya dirumuskan dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal 32 tersebut, yang djumlahnja sama besarnya bagi tiap-tiap anggauta bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 9 ayat (1), maka simpanan-simpanan pokok dan wadjab dalam koperasi primer tidak mungkin ditetapkan dalam jumlah yang besar, akan tetapi djustru harus ditekan serendah-rendahnya agar rakjat pekerdja dan produsen ketjil yang lemah kedudukan ekonominja tidak tertutup kemungkinannya untuk mendjadi anggauta koperasi.

Pasal 34.

Keharusan penjiimanan serta pengaturan lalu-lintas uang koperasi melalui Bank Pemerintah yang bergerak dalam bidang perkoperasian, dimaksudkan untuk :

- a. mendjamin keamanan uang koperasi ;
- b. mengurangi uang dalam peredaran (mempertumbuhan sistim lalu-lintas uang setjara giral).
- c. mengetahui dengan djelas peraturan serta perkembangan kekuatan riil gerakan koperasi.

Maksud ketentuan ayat (2) pasal ini yang meniatkan bahwa Menteri bersama-sama dengan Menteri Urusan Bank Sentral mengatur baik pelaksanaan maupun penjiimanan dari ketentuan ayat (1) pasal ini, hanjalah dalam hal-hal ada Bank Pemerintah yang bergerak dibidang perkoperasian.

Akan tetapi dalam hal tidak ada Bank Pemerintah yang bergerak dibidang perkoperasian, terutama dipelosok-pelosok, adalah wewenang penuh dari Menteri untuk mengaturnya sendiri, sehingga yang dimaksud perusahaan ayat (2) ini, dilihat dari segi kemungkinan-kemungkinan tersebut diatas ialah bahwa pelaksanaan dan penjiimanan dari ketentuan ayat (1) dapat diatur oleh Menteri dan atau bersama-sama Menteri Bank Sentral.

Bagian 5.

Tanggungjan.

Pasal 35.

Jang dimaksud dengan "tindakan" dalam pasal ini ialah misalnja perdiandjian, pentjurian, penggelapan, penjalahgunaan kekuasaan.

Jang dimaksud dengan "kedjadian" ialah misalnja : kebakaran, kerusakan.

Pasal 36.

Pasal ini membedakan adanya dua matjam tanggungjan, jaitu :

- a. tanggungjan koperasi,
- b. tanggungjan pengurus.
- (a). Tanggungan koperasi.

Seperti tersimpul dalam perumusan ayat (1) huruf a pasal ini, tanggungjan koperasi dapat dibebankan kepada :

1. koperasi, apabila djumlah tanggungjan koperasi tersebut dapat ditjukupi dengan tjadangan koperasi yang sengadja diadakan khusus untuk menutup kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu tindakan atau kedjadian seperti termaksud dalam pasal 28 ayat (2).
2. anggauta, apabila djumlah tanggungjan koperasi tidak dapat ditjukupi dengan tjadangan koperasi akan tetapi perlu ditjukupi kekurangannya atau

seluruhnja (dalam hal tjadangan belum tersusun atau kosong sama sekali) setjara gotong-rojongan antar anggauta.

(b). Tanggungan pengurus.

Kelalaian/kesalahan pengurus yang dimaksud dalam pasal ini dapat berbentuk penjahgunaan pengurus seperti antara lain mengambil tindakan-tindakan diluar rangka keputusan rapat anggauta atau ketentuan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga. Sesuai dengan ketentuan pasal 38 hal-hal lebih lanjut mengenai tanggungjan ini, akan diatur oleh Menteri.

Pasal 37.

Maksud ketentuan pasal 37 ini adalah untuk melindungi anggauta (orang) dari pembebanan-pembebanan tanggungjan koperasi baik pada penutupan sesuatu tahun buku atau pada pembubaran koperasi.

Teristimewa dalam menieleasikan tanggungjan pada pembubaran koperasi tingkat pusat, gabungan dan induk perlu diadakan pembatasan agar dianjan sampai tanggungjan tersebut memberatkan anggauta (orang).

Menurut kelaziman pembatasan demikian diatur dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan dalam bentuk menentukan batas maksimal (tertinggi) tanggungjan bagi anggauta (orang).

Pasal 38.

Tjukup djelas

B A B VII.

KEDUDUKAN HUKUM KOPERASI

Bagian 1.

Pasal 39.

Kedudukan Hukum Koperasi.

Berdasarkan ketentuan per-undang-undangan yang berlaku sekarang ini sesuatu badan memperoleh sifat, sebagai badan hukum dengan dua djalan jaitu :

- (a) karena ketentuan Undang-Undang, atau
- (b) disahkan sebagai badan hukum oleh instansi yang berwenang misalnja Departemen Kehakiman.

Pasal inilah yang menegaskan bahwa koperasi memperoleh sifatnya sebagai badan hukum karena ketentuan Undang-Undang ini dan pengesahannya tidak dilakukan oleh Departemen Kehakiman, akan tetapi oleh Pedjab yang diberi kuasa untuk itu oleh Menteri (jang diserahuruskan perkoperasian).

Bagian 2.

Sjarat-sjarat mendirikan koperasi.

Pasal 40 dan 41.

Sesuai dengan pasal 39, maka kedudukan koperasi untuk dapat mempunjal kekuatan sebagai suatu badan hukum, harus memenuhi sjarat-sjarat yang ditentukan dalam pasal 40 ini.

Pendirian koperasi sebagai badan hukum tersebut dibuat dalam akte pendirian yang isi pokoknja terdiri dari 2 hal jaitu :

- a. pernyataan pendirian koperasi itu sendiri (ayat 1 huruf a), dan
- b. anggaran dasar koperasi (ayat 1 huruf b) yang toh-tjontohnja akan diberikan oleh Menteri.

Akte pendirian dislnj tidak perlu berupa akte yang dibuat dihadapan notaris dengan meterai dan sebagainya tetapi tjukup dengan memenuhi sjarat-sjarat serta toh-tjontoh yang telah ditetapkan dalam pedoman-pedoman yang telah diberikan Menteri seperti yang dimaksudkan diatas.

Ketentuan-ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi pendirian koperasi-koperasi primer saja, tetapi berlaku juga bagi pendirian pusat koperasi, gabungan koperasi dan induk koperasi.

Dalam hal ada perubahan-perubahan dalam akte pendirian termasuk anggaran dasar sebagaimana disebutkan pasal 41, ketentuan-ketentuan serta prosedur pasal 40 ini diperlukan juga.

Pasal 42 dan 43.

Pasal 42 dan pasal 43 ini pada pokoknya mengatur cara-cara/prosedur pendaftaran/pengehasan koperasi sebagai badan hukum. Koperasi diwajibkan resmi berdiri dan mempunyai kedudukan yang sama sebagai badan hukum, sejak tanggal penerbitannya pada pejabat.

Saat ini koperasi sebagai badan hukum, disini menjumpang dari keazaman dari badan-badan hukum lainnya, karena tidak ditentukan oleh pengumumannya dalam Berita Negara tetapi sejak didaftar pada buku daftar umum yang disediakan untuk keperluan tersebut pada kantor pejabat. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah proses pengehasan koperasi sebagai badan hukum disamping untuk kemudahan kesulitan-kesulitan yang bersuat administratif. Dengan demikian dapat mempermudah dan mendorong penumbuhan koperasi yang berprestasi sebagai suatu organisasi perekonomian rakyat.

Segala tindakan-tindakan yang menimbulkan ikatan-ikatan yang bersuat hak dan kewajiban pada waktu sebelum tanggal pendaftaran, sejak pengehasan (tanggal pendaftaran) selanjutnya itu juga menjadi sah sebagai tindakan-tindakan hukum koperasi tersebut. Dengan demikian segala tindakan yang merugikan pada waktu sebelum koperasi disahkan sebagai badan hukum, adalah menjadi tanggungan pengurus saja. Sedangkan segala tindakan-tindakan koperasi setelah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum mengandung dua kemungkinan yaitu dapat menjadi tanggungan koperasi atau pengurus.

Pasal 44, 45 dan 46.

Pengesahan atau penolakan pengehasan yang diberikan oleh pejabat harus segera diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak pejabat menerima permintaan pengehasan koperasi.

Hal tersebut disatu pihak dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada pendiri koperasi, agar segera mendapat putusan diterima atau tidaknya permintaan pengehasan badan hukum. Dari pihak lain, yaitu pemberian kewenangan kepada pejabat adalah untuk menjegah adanya koperasi-koperasi liar/gadungan, sehingga koperasi yang mendapatkan pengehasan badan hukum itu adalah koperasi yang betul-betul akan mendapatkan kepertajaan pejabat.

Pasal 47.

Dalam pasal ini dikandung maksud untuk memberikan wewenang kepada Menteri, agar dapat mengadakan tindakan-tindakan yang tegas terhadap setiap bentuk penyalahgunaan nama koperasi.

Wewenang tersebut dipertegas lagi dengan ketentuan pasal 56 ayat (5).

Bagian 3.

Pembubaran Koperasi.

Pasal 48 dan 49.

Pembubaran koperasi yang akan dilakukan oleh pejabat harus diberitahukan lebih dahulu kepada koperasi yang bersangkutan. Pembubaran itu terutama dapat dilakukan pada 2 (dua) alasan:

1. karena syarat-syarat yang disebutkan oleh ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini atau peraturan-peraturan pelaksanaannya.

2. karena memang dikehendaki oleh para anggota sendiri, yang dapat disimpulkan dari keputusan rapat anggota.

Tenggang waktu 3 bulan yang dihitung sejak tanggal pengiriman surat tertajat pemberitahuan akan adanya pembubaran, koperasi disatu pihak dimaksudkan agar baik pengurus atau $\frac{1}{2}$ dari anggota dapat mengajukan keberatan terhadap maksud pembubaran koperasi tersebut. Dilain pihak dimaksudkan agar pejabat tidak sewenang-wenang menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 50 s/d 53.

Pasal-pasal ini adalah merupakan rangkaian dari pada pasal-pasal pembubaran koperasi, yang mengatur juga penyelesaian, oleh karena sejak saat dikeluarkannya surat keputusan pembubaran koperasi, tidak ada lagi pengurus yang dapat menyelesaikan semua urusan koperasi termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban, maka pekerjaan itu ditugaskan kepada penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 53.

Bila pembubaran koperasi dilakukan karena ketentuan Undang-Undang, maka penyelesaian dapat diangkat/ditunjuk oleh pejabat dan bila pembubaran dikehendaki oleh keputusan rapat anggota maka penunjukkan penyelesaian dapat diputuskan dalam rapat anggota.

Sekalipun penyelesaian tersebut ditentukan oleh rapat anggota, keharusan administratif untuk dimuat dalam surat keputusan pejabat tentang pembubaran koperasi dan penempatannya dalam Berita Negara masih perlu dilakukan sebagaimana mestinya.

B A B VIII.

PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN KOPERASI

Bagian 1.

Pasal 54.

Pembinaan koperasi terutama dalam mengembangkan usahanya tidak mungkin dilayani oleh dan menjadi tanggung jawab dari satu instansi Pemerintah saja, akan tetapi harus dilakukan serta dipikul oleh segenap instansi Pemerintah maupun perusahaan-perusahaan Negara baik di Pusat maupun di Daerah.

Oleh sebab itu segenap fasilitas yang ada pada tiap-tiap instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah sesuai dengan bidangnya masing-masing mesti dikordinasikan untuk melaksanakan pola yang ditetapkan oleh Menteri.

Pemberian wewenang pada Menteri tersebut dimaksudkan untuk menjamin adanya kesatuan kebidjaksanaan perkoperasian.

Bagian 2.

Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 55.

Adanya instansi Pemerintah yang disertai tugas khusus pembinaan/pengawasan atas koperasi adalah konsekwensi logis dari pada ketentuan pasal 7 ayat (1), yang menegaskan bahwa kebidjaksanaan pokok perkoperasian ditetapkan oleh Pemerintah. Tanpa adanya aparatur tersendiri yang sepenuhnya dapat menumpahkan perhatiannya kepada perkembangan koperasi maka penentuan kebidjaksanaan pokok perkoperasian tersebut diatas akan sangat pintjang bahkan ada kemungkinan bahwa kebidjaksanaan pokok yang ditentukan oleh Pemerintah lepas dari perkembangan koperasi yang sebenarnya.

Ayat (2) pasal ini memberikan wewenang pada Menteri untuk menundukkan pejabat dan mengatur koordinasi serta hubungan kerja antara Direktorat Koperasi, Gerakan Koperasi Indonesia termaksud dalam pasal 24 dan badan/instansi lain yang bergerak dibidang pembinaan/pengawasan gerakan koperasi.

Hal ini untuk menjegah kesimpang-siuran dan menjamin adanya keserasian antara semua instansi/badan yang tugas-tugasnya mempunyai hubungan erat satu sama lain.

B A B IX. KETENTUAN PIDANA.

Pasal 56.

Maksud diadakan pasal ini ialah untuk menentukan pasal-pasal mana dari Undang-Undang ini yang dianggap penting untuk dinjatakan sebagai ketentuan pidana sehingga diharapkan dapat mentjegah penjelewengan-penjelewengan dari pada kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, baik penjelewengan itu bersifat kesengajaan atau kelalaian. Tindakan-tindakan pidana disini dibedakan dalam 2 matjam, jaitu :

1. pelanggaran, yang berlaku bagi pasal 25 ayat (1) dan pasal 47 ;

2. kedjahatan, yang berlaku bagi pasal 29 ayat (4). ketentuan, pasal 29 ayat (4) adalah memang penjelewengan dari ketentuan, pasal 29 ayat (4) adalah memang wadjar untuk melindungi para anggauta koperasi, yang terutama terdiri dari rakjat pekerdja dan para produsen ketjil, dan untuk menghindarkan penjahal-gunaan pungutan-pungutan/sumbangan-sumbangan yang bersifat liar.

Sanksi-sanksi lain diluar ketentuan tersebut dalam pasal ini, jaitu berupa sanksi-sanksi administratif diatur oleh Menteri. Sanksi-sanksi administratif ini misalnja dapat berupa penghentian sementara terhadap kegiatan pengurus, pentjabutan pengesahan koperasi sebagai badan hukum.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegakkan disiplin dari pengurus, anggauta dan koperasi itu sendiri.

Pasal 57.

Jang dimaksud dengan koperasi golongan menurut kenyataan jang ada sekarang ini adalah koperasi produksi atau koperasi konsumsi atau koperasi djasa atau koperasi serba-usaha jang keanggautaannja terbatas pada

sesuatu golongan misalnja golongan angkatan bersendjata, pegawai Negeri, Wanita, kaum pensiun, Veteran serta bekas pedjuang lainnja dan jang sjarat-sjarat keanggautaannja menjimpang dari ketentuan pasal 9 akan tetapi lebih didasarkan pada pemeliharaan kesatuan rumpun golongan (corps-geest) jang bersangkutan.

Undang-Undang ini prinsipnja tidak membenarkan adanya semua koperasi-koperasi golongan seperti tersebut diatas.

Oleh karena itu Pemerintah oleh Undang-Undang ini diwadjabkan mengintegrasikan koperasi-koperasi golongan tersebut diatas setjara berentjana dengan koperasi jang djenisnja sudah diatur menurut ketentuan pasal 9 Undang-Undang ini, ketjuali koperasi golongan dari angkatan bersendjata dan pegawai Negeri jang masih aktif.

Maksud mengintegrasikan koperasi golongan dengan koperasi menurut ketentuan Undang-Undang ini bukanlah untuk menghilangkan usaha-usaha konstruktif serta proyek ekonomi jang telah dikembangkan setjara baik dalam bentuk koperasi oleh golongan jang bersangkutan apalagi mematikan semangat kepeloporan, pangabdian sifat kerakjatan dan kemasjarakatan jang telah dipupukan oleh golongan jang bersangkutan, melainkan djustru agar sifat kepeloporan dan lain sebagainya dari pada golongan tersebut dapat pula disebarikan kepada masjarakat seluruhnya.

Pasal 58.

Ketentuan-ketentuan pasal 58 terutama ayat (2) adalah untuk memberikan dasar hukum atas ketentuan ketentuan pelaksana dari pada Undang-Undang No. Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi jang mas dapat dipergunakan dalam waktu peralihan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

B A B XI.

Ketentuan-Ketentuan Penutup.

Pasal 59.

Tjukup djelas.

Sambungan dari hal. 18

Pemerintah menjetop impor daripada mesin-mesin mesin-mesin jang bisa kita bikin sendiri, dengan sendirinja disini industri mesin akan naik. Kita di Pasuruan sudah membikin diesel sendiri. Lha, nanti kalau Pemerintah menjetop impor buat diesel machines jang ketjil-ketjil, wah disini produksi diesel machines naik. Pemerintah misalnja akan menjetop pembelian mesin-mesin buat menggilang padi dan djagung. Sebab kita sendiri bisa membuat mesin penggilang padi dan djagung, buat apa kita mesti beli dari Djepang. Apalagi nanti kalau pabrik besi Tjilegon sudah berdjalan.

Nah, ini adalah pembantingan setir jang hebat sekali, Saudara-saudara, Saja minta supaya koperasi-koperasi dipimpin kearah ini, supaya nanti didalam Munskop jang kedua soal ini dibitjarkan dengan tjara jang sematang-matangnja, agar supaya djikalau nanti Pemerintah tahun muka membanting setir, semua koperasi sudah ingesteld op deze pembantingan setir.



Topi dan tas jang dianjam dalam gambar terbuat daun lontar.

Anggur

TAY AN HOO



TJAP

IKAN MAS



Anggur

- ▶ *beranak*
- ▶ *djin som*
- ▶ *buntut men-*
djangan
- ▶ *an thay*

selalu mendjamin

KESEHATAN
HIDUP ANDA
SETIAP SAAT....

TRIBUTOR
NGGAL :



P.N.

PANTJA NIAGA

Anda ingin SUKSES dalam Perdagangan ?

Datangilah

P.N. PEMBANGUNAN NIAGA



**Aparat Revolusi dalam
bidang perdagangan :**

IMPOR

EKSPOR

KONTRAKTOR

PROJEK dan INDUSTRI

Untuk suksesnja usaha anda, harap berhubungan dengan :

P.N. PEMBANGUNAN NIAGA

Division¹ :

- 1. IMPOR BAHAN BANGUNAN**
- 2. IMPOR ALAT² BESAR/MESIN²**
- 3. IMPOR MESIN² SANDANG**

Alamat :

Djl. Hajam Wuruk no. 127.
D J A K A R T A

Division² :

- 1. IMPOR SANDANG PANGAN**
- 2. IMPOR BAHAN² CHEMICALIEN/PHARMASI**
- 3. E K S P O R**

Alamat :

Djl. Gadjah Mada no. 18.
D J A K A R T A

WARTA

Edisi Dwi Dasawarsa
Proklamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia

Perdagangan

RECEIVED
NOV 11 1966
WIS. LIBRARY

AP
W299
P433
18
10

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini
menjatakan

kemerdekaan Indonesia

Hal-hal jang mengenai pemindahan
kekoesaan dan lain-lain diselengga-
rakan dengan tjara seksama dan dalam
tempo jang sesingkat - singkatnja.

Djakarta, 17 Agoestoës 1945

Atas nama
bangsa Indonesia

Soekarno - Hatta

110

AHUN KE - XVIII

1965

MADJALAH

„WARTA PERDAGANGAN”

Terbit tiap 2 Minggu sekali

Diterbitkan oleh :

Departemen Perdagangan Dalam Negeri
berserta Urusan Perdagangan Luar Negeri
dari Kompartimen Luar Negeri/H.E.L.N.
dan Perdagangan Luar Negeri.

Pelindung :

J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/
Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri
BRIG. DJENDERAL A. JUSUF.

Penasehat :

1. Pembantu Utama Kuasa Menteri Urusan
Perdagangan Luar Negeri
S O E D I R O M.A.
2. Pembantu Utama Menteri Perdagangan
Dalam Negeri
Prof. Dr. ARIFIN ABDURACHMAN.

Pemimpin Umum :

Kepala Direktorat Marketing dan Research:
Ir. J.J. Pitoy M.A.

Staf Redaksi :

Staf Direktorat Marketing dan Research.

Penanggung Djawab :

Kepala Seksi Publikasi Madjalah
Anwar B. Harahap.

Pembantu, Tetap :

Prof. Ir. Teko Sumodiwirjo — Kolonel Jusuf
Ramli — Major A. Rachman Rukmantara —
R. Hertatyanto S.H. — Drs. Waskito —
Dr. J. Panglaykim.

Pembantu Khusus :

Budhiman B.A. — Kolonel Usman Ismail —
Alamsjah S.B.P. — R. H. Tuwaidan M.A. —
Drs. Sjaaf Muchtar — Major Drs Sukadjat
— R. Isa — Drs A. Aidit — Suprpto —
Sudjadi — A. Karim Usman S.H. — Dudy
Djaya.

Alamat Redaksi dan Tata Usaha :

Madjalah „WARTA PERDAGANGAN”
Direktorat Marketing dan Research
Djalan Tanah Abang Timur No. 87
D J A K A R T A

Pelaksana/Pertjetakan :

Kepala Pertjetakan P.N. Karya Tjotas
Burdi Reksodirdjo.

Daftar Isi

1. Tjapailah Bintang-Bintang Dilang
("Tahun Berdikari") Pidato Pres
den Sukarno pada Hari Ulang
Tahun Ke-20 Republik Indonesi
17 Agustus 1965.
2. Mentjapai Indonesia Merdeka
(Adjaran Pemimpin Besar Rev
lusi Bung Karno).



Pembayaran uang langganan dilakukan dimuka deng

1. Penjetoran atas Rekening Mad
"Warta Perdagangan" Kode No. :
W.A.-194, pada Bank Indonesia —
Djl. : Thamrin, Djakarta.
2. Dinas Giro dan Tjek Pos atau de
pos wissel jang langsung dialam
kepada Tata Usaha Warta Perdag
Direktorat Marketing dan Research

Surat Izin terbit No. 21A/SK/UPPG, SIT
tanggal 17-4-1965.

BINTANG - BINTANG DILANGIT

(TAHUN BERDIKARI)

PIDATO PRESIDEN SUKARNO PADA HARI ULANG-TAHUN KE-20 REPUBLIK INDONESIA,
17 AGUSTUS 1965.

Saudara-saudara !

Tjatkanlah, Saudara-saudara ! Tjatkan, tjamkanlah ! Hari ini genap 20 tahun Proklamasi kemerdekaan ! Hari ini tepat 20 tahun kita mendjadi bangsa merdeka ! Hari ini djangkap 20 tahun sedjak kita — Sukarno dan Hatta — atas nama Bangsa Indonesia memaklumkan Proklamasi sutji 17 Agustus dengan mengutjapkan satu pidato singkat jang uachiri dengan kata-kata : „Kita sekarang t e l a h merdeka ! Tidak ada satu ikatan lagi jang mengikat tanah air kita. Mulai saat ini kita menjusun Negara kita ! Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia, — merdeka kekal dan abadi. Insja Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu !”

Hari ini, detik ini, rasa hatiku luluh mendjadi satu dengan hati Rakjatku, dengan hati Tanah-airku, dengan hati Revolusi. Fikiran dan perasaanku berpadu dengan fikiran dan perasaan semua sadja jang menintai dan membela Indonesia tanah tumpah darah kita, dikota-kota dan didesa-desa, digunung-gunung dan dipantai-pantai, dari Sabang sampai Merauke, dari Banda Atjeh sampai Sukarnapura. Bahkan djuga dengan Saudara-saudara kita sesama patriot jang kini menjalankan tugas dikelima-lima benua dibolau-umi ini ! Hari ini nama kita bukan Sukarno, bukan Subandrio, bukan Ali, bukan Yani, bukan Nasution, bukan Idham, bukan Aidit, bukan Dadap, bukan Waru, bukan Suto bukan Nojo, bukan Aminah bukan Fatimah, — hari ini nama kita ialah Indonesia ! Djabatan kiia? Hari ini kita bukan Kepala Negara bukan Menteri, bukan pegawai bukan buruh, bukan petani, bukan nelajan, bukan mahasiswa, bukan seniman, bukan sardjana, bukan wartawan, — hari ini djabatan kita ialah p a t r i o t ! Datutkatja Patriot Indonesia ! Urusan kita? Urusan kita hari ini — dan bukan hanja hari ini tetapi seterusnya — urusan kita bukan semata-mata politik, bukan melulu ekonomi, bukan hanja kebudayaan, bukan mligi ilmu, bukan militer thok, — urusan kita ialah k e m e r d e k a a n !

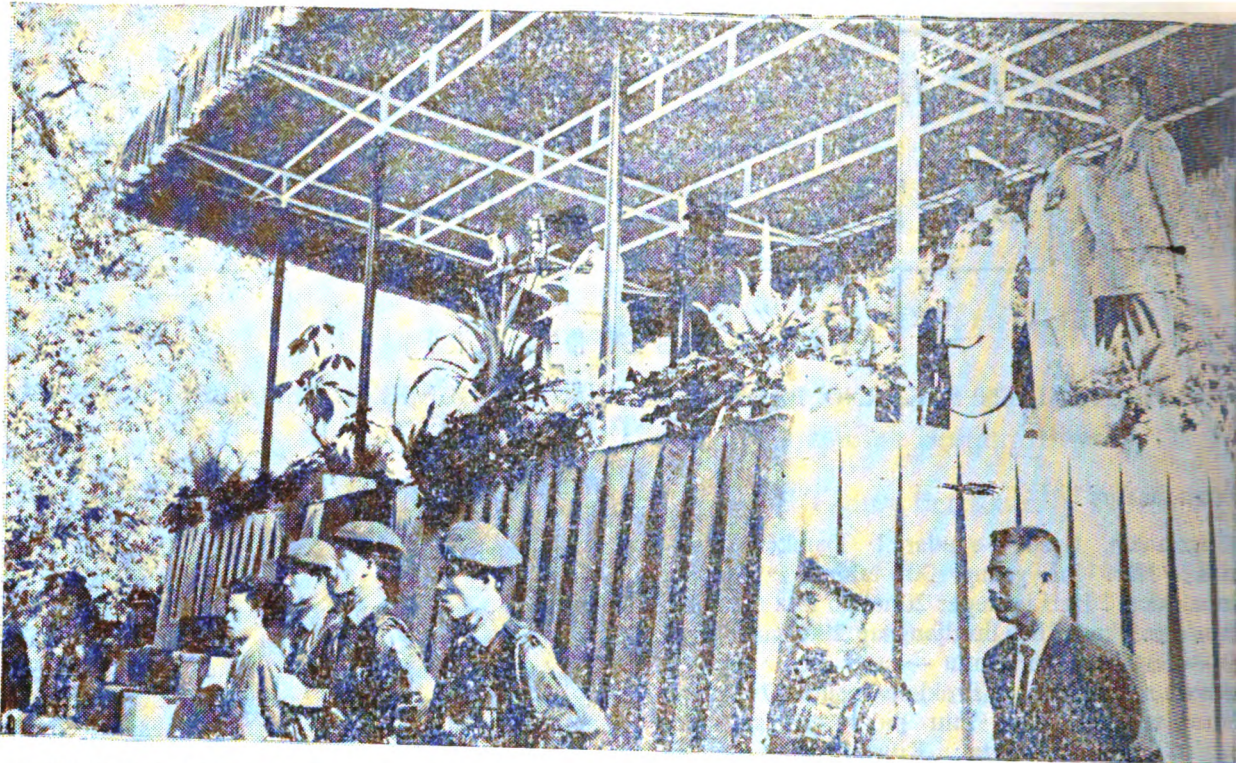
Sungguh kita diliputi rasa sjukur kehadirat Allah w.t., jang telah melimpahkan rahmatNja kepada kita sekalian dan hari inipun kita memudja kebesaranNja. Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar !

Kawan-kawanku seperdjoangan, Kalau hari ini mongkok kita punja dada, dan kalau hari ini menetes kita punja air mata, — djanganlah merasa malu. Aku t i d a k merasa malu, aku b a n g g a bahwa dada kita kembang — mekar — karena rasa tjinta tanah air jang tidak berbatas. Aku bangga bahwa kita memiliki air-mata patriotisme. Dan kalau didunia ini ada jang mentjertja kita, mengedjek kita, mertertawakan kita, biarlah mereka tahu — memang beginilah pedjoang-pedjoang untuk kemerdekaan nasional, memang beginilah kaum jang tidak hanja berani hidup tetapi djuga berani mati untuk tjita-tjita jang paling sutji didunia ini, jaitu kemerdekaan dan kebebasan umat manusia.

Resapkanlah, endapkanlah, renungkanlah bahwa kita ini sudah 20 tahun m e r d e k a ! Apa artinja 20 tahun dalam sedjarah? Tergantung, Saudara-saudara, tergantung dari peranan dan iuran kita kepada sedjarah itu ! Manakala kita melempem, manakala jiwa kita lembek, manakala kita menjerah sebagai objek-sedjarah dan tidak berusaha mendjadi subjek — sedjarah, maka djangkalan 20 tahun, bahkan 200 tahun sekalipun tetapi 200 tahun jang melempem, 200 tahun itu akan lenjap dalam kalbu sedjarah sebagai bukan apa-apa, ja, sekali lagi bukan apa-apa. Tetapi manakala kita berlawan, berdjoang, mendjebol dan membangun, mendestruksi dan mengkonstruksi, berfantasi dan berkreasi, manakala kita berdjiwa elang radjawali dan bersemangat banteng, manakala kita pantas disebut pedjoang sebagaimana 20 tahun ini kita membuktikannja, maka djangkalan 20 tahun, 2 tahun sadjapun tetapi 2 tahun jang dahsjat demikian itu, 2 tahun itu akan tertjatat abadi dalam sedjarah dan akan berlaku sebagai teladan.

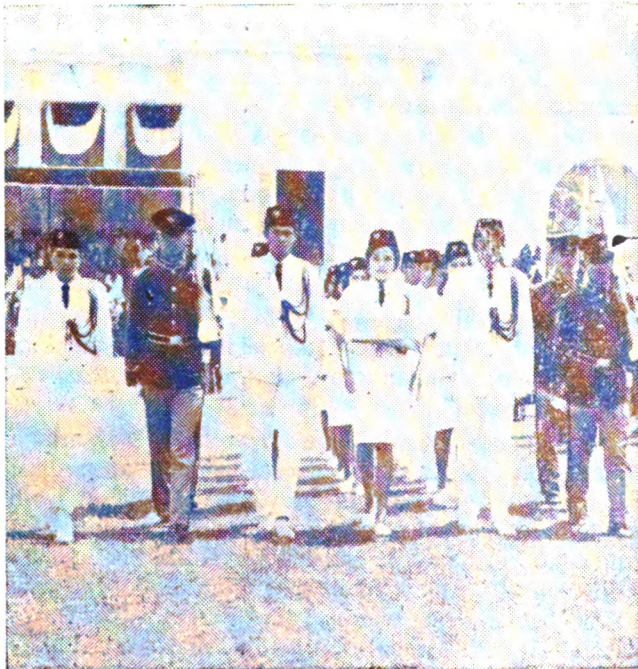
Apakah 20 tahun jang dibelakang punggung kita itu benar-benar telah kita djalani dengan pantas, dengan memadai?

Dunia mengalami banjak revolusi. Diantaranja jang paling besar adalah revolusi Amerika, revolusi Perantjis, revolusi Rusia. Revolusi² itu djauh lebih dahulu terdjadi daripada revolusi kita, revolusi² itu mempunyai voorsprong daripada revolusi kita. Tetapi djikalau kita tengok hasil² jang telah dibuahkan oleh Revolusi Amerika, oleh Revolusi Perantjis dan Revolusi Rusia itu sampai dewasa ini, maka saja bukan



P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi sedang mengutjapkan pidato "Tjapailah Bintang-Bintang Dilangit (Tahun Berdikari)".

Bendera Pusaka sedang dibawa untuk dikibarkan



pengibaran bendera pusaka sang Dwiwarna jang dikibarkan pada tiap² hari Kramat 17 Agustus.

nja tidak malu dengan Revolusi Agustus 1945 kita, tapi saja — dengan tidak ajal sedikitpun — berani mengatakan bahwa Revolusi kita adalah revolusi jang hebat maha hebat !

Kita jang bukan kapitalis tidak menganggap uang atau harta-kekajaan sebagai modal jang paling berga. Bagi kita manusia lah modal jang paling utama. Dan pada manusia, jang paling penting adalah kesedarannja. Kesedaran itupun bermatjam-matjam, dan diantara banjak kesedaran-kesedaran itu jang menentukan adalah kesedaran politik. Mengenai kesedaran politik ini, Rakjat Indonesia jang telah ditempa oleh palu-godam revolusi 20 tahun nanja, sungguh patut dibanggakan. Rakjat Indonesia mudjur tidak dididik dalam semangat burdjuis erusahalah mendjadi miljoner, setiap orang bisa mendjadi miljoner". Rakjat Indonesia djuga berhagia tidak dididik dalam semangat oportunistis jang Perang Dunia ke-II dan perang melawan resi kolonial 1947 dan 1948 memakan banjak rban, djangan peperangan datang kembali". alahan kalau ditanjakan kepada Saudara-saudara gaimana seandainja kita harus mendjalani masa tahun jang boleh kita pilih sendiri, maka Saudara-udara, djawab Saudara² haruslah : „Kalau kami leh pilih djalan kami sendiri, kami akan djalani mbali 20 tahun seperti 20 tahun jang lewat ini". emikianlah hendaknja semangat kita, ketetapan ti kita, tekad kita !

Adalah penjair jang masjhur, Alexander Blok, jang pernah menjanjakan :

Mereka jang dilahirkan di tahun² kematjetan, Tiada irgat akan djalannja sendiri.

Kita — putra² tahun keberanian.....

Tiada sesuatupun kita lupakan.

Ja, kita adalah putra² tahun² keberanian. Kita alahan adalah putra² gelombang jang menderuru, kita adalah putra² prahara jang dahsjat, lahsjat-dahsjatnja ! Kita bangsa gemblengan ! Kita nggembleng diri kita sendiri, dan kita menggem- meng zaman kita !

Dan bersama penjair lain jang masjhur, namanja ult Whitman, ingin saja memudja :

O, kehidupan — gairahmu, denjut-nadimu, ke- aanmu tak bisa ditundukkan.

Tiada manusia, tiada dewa, tiada setan, tiada iblis ng bisa menundukkan gairah kita, denjut-nadi kita, bisaan kita, k e m a u a n kita.

Kita mau, maka kita bisa. 20 tahun ng lalu kita m a u merdeka, maka itu kita bisa rdeka. Sekarang kita mau mempertahankan kemerdekaan kita, maka itu kita bisa mempertahankan merdekaan kita !

Dalam arti kata jang sedalam-dalamnja, kita telah lani 20 tahun jang silam ini dengan pantas, de- an djitu. Apakah seterusnya kita akan hidup pan- dan djitu sebagai pedjoang, inipun sepenuhnya gantung dari kita sendiri. Perdjjuangan, perdjjuang-

an jang sedjati-djatinja perdjjuangan adalah selalu a b a d i. For a fighting nation there is no journey's end. Kita tidak akan berhenti ditengah djalan. Bukan sadja karena sudah kepalang-tanggung, tetapi karena tekad kita dan watak kita memang tidak kenal ber- hentinja perdjjuangan. Era euj djang, tjamah rek, kalau kita mandek ! Mundur hantjur, mandek am- blek. Sembojan kita hanjalah satu : Madju terus, pan- tang mundur !

Hari ini saja ingin memberikan pertanggungan- djawab kepada Rakjatku, kepada dunia, kepada Tuhan Seru sekalian alam, atas segala daja-upaja bangsa Indonesia dan aku sebagai salah seorang di- antaranja, dalam masa sedjarah 20 tahun ini. Karena aku sendiri tak pernah absen selama 20 tahun ini, karena aku adalah penjambung lidah Rakjat Indo- nesia jang pada tiap² 17 Agustus mendjura bitjarai sikap dan pendirian Negara dan Rakjat Indonesia, maka biarlah aku tjupliki bagian² dari pidato² 17 Agustus-ku — 20 banjaknja, dari 1945 sampai 1964 — jang merupakan benang-merah jang mendjeludjur setjara konsekwen.

1945.

Dalam pidatoku **17 Agustus 1945** kukatakan : „Sekarang tibalah saatnja kita benar² mengambil nasib-bangsa dan nasib-tanah-air didalam tangan kita sendiri. Hanja bangsa jang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri de- ngan kuatnja”.

1946.

Dalam pidatoku **Sekali merdeka, tetap merdeka !** kutjetuskan sembojan : „Kita tjinta damai, tetapi kita lebih lagi tjinta kemerdekaan”.

1947.

Dalam pidatoku **Rawe-rawe rantas, malang-malang putung !** kutegsakan : Kita tidak mau dimakan. Dus kita melawan !..... Sesudah Belanda menggem- pur..... mulailah ia dengan politiknya divide et impera, politiknya memetjah-belah..... maka kita bangsa Indonesia harus bersembojan b e r s a t u, berdjjuang, b e r k u a s a !

1948.

Dalam pidatoku **Seluruh nusantara berdjiwa Republik** kunjatakan : „Kemerdekaan tidak menju- dahi soal², kemerdekaan malah membangunkan soal², tetapi kemerdekaan djuga memberi djalan untuk memetjahkan soal² itu. Hanja ketidak-merde- kaanlah jang tidak memberi djalan untuk memetjah- kan soal²..... Rumah kita dikepung, rumah kita hendak dihantjurkan..... Bersatulah. Bhinneka tunggal ika. Kalau mau dipersatukan, tentulah ber- satu pula !”

1949.

Dalam pidatoku **Tetaplah bersemangat elang radjawali !** kubilang : „Kita belum hidup didalam sinar bulan jang purnama, kita masih hidup dimasa pantjaroba, tetaplah bersemangat elang radjawali !”

1950.

Dalam pidatoku **Dari Sabang sampai Merauke** kugariskan : „Djanganlah mengira kita semua sudah tjukup berdjasa dengan turunnja sitiga-warna. Selama masih ada ratap-tangis digubuk-gubuk, belumlah pekerdjaan kita selesai !..... Berdjaoanglah terus dengan mengutjurkan sebanjak-banjak keringat”.

1951.

Dalam pidatoku **Tjapailah tata-tenteram, kertarahardja** kumaklumkan : „Adakanlah koordinasi, adakanlah simfoni jang seharmonis-harmonisnja antara kepentingan sendiri dan kepentingan umum, dan djanganlah kepentingan sendiri itu dimenangkan diatas kepentingan umum !”

1952.

Dalam pidatoku **Harapan dan Kenyataan** kuserukan : „Kembali kepada djiwa Proklamasi..... kembali kepada sari intinja jang sedjati, jaitu pertama djiwa merdeka-nasional..... kedua djiwa ichlas..... ketiga djiwa persatuan..... keempat djiwa pembangun”.

1953.

Dalam pidatoku **Djadilah alat sedjarah !** Kutekankan pentingnja : „bakat persatuan, bakat „gotong rojong” jang memang telah bersulur akar dalam djiwa Indonesia, ketambahan lagi daja penjatu jang datang dari azas Pantja Sila”.

1954.

Dalam pidatoku **Berirama dengan kodrat** aku stress : „Dengan „Bhinneka Tunggal Ika” dan Pantja Sila, kita, prinsipil dan dengan perbuatan, berdjoang terus melawan kolonialisme dan imperialisme dimana sadja”.

1955.

Dalam pidatoku **Tetap terbanglah radjawali !** kumekukakan „Pantja Dharma” : „persatuan bangsa harus kita g e m b l e n g.... tiap² tenaga pemetjah persatuan harus kita berantas..... pembangunan di segala lapangan harus kita teruskan..... perdjaoangan mengembalikan Irian Barat pada chususnja, perdjaoangan menjapu bersih tiap² sisa imperialisme — kolonialisme pada umumnja, harus kita landjutkan..... pemilihan umum harus kita selenggarakan”.

1956.

Dalam pidatoku **Berilah isi kepada hidupmu !** kutegaskan : „Sekali kita berani bertindak revolusioner, tetap kita harus berani bertindak revolusioner..... Djangan setengah-tengah, djangan ragu², djangan mandek setengah djalan..... kita adalah satu „fighting nation” jang tidak mengenal „journey’s end”.

1957

Dalam pidatoku **Satu tahun ketentuan** kukobar-kobarkan : „Revolusi Indonesia benar²

Revolusi Rakjat..... Tujuan kita masjarakat adil dan makmur, masjarakat „Rakjat untuk rakjat” Karakteristik segenap tindak-tanduk perdjaoangan kita harus t e t a p. Karakteristik Rakjat..... demokrasi Rakjat, demokrasi „met leiderschap”, demokrasi t e r p i m p i n !

1958.

Dalam pidatoku **Tahun tantangan** kusimpulkan : „Rakjat 1958 sekarang sudah lebih sadar..... tujuannya lagi tak terang siapa kawan siapa lawan, tidak lagi tak terang siapa jang setia dan siapa pengchianat..... siapa pemimpin sedjati, dan siapa pemimpin anekdotik..... siapa pemimpin gadungan..... Dalam masa tantangan seperti sekarang ini, lebih daripada dimasa- jang lampau, kita harus menggembelng — kembangkan persatuan..... „Persatuan adalah tuntutan sedjarah”.

1959.

Dalam pidatoku **Penemuan kembali Revolusi** kuserukan jang kemudian diperkuat oleh seluruh bangsa dan disahkan sebagai **Manifesto Politik Republik Indonesia** (Manipol), kurumkanlah „tiga segi kerangka Revolusi kita dan 5 „persoalan” pokok Revolusi Indonesia” jaitu : Dasar/tujuan dan kewadjoaban Revolusi Indonesia, kekuatan² sosial Revolusi Indonesia, sifat Revolusi Indonesia, hari-depan Revolusi Indonesia, dan musuh² Revolusi Indonesia.

1960.

Dalam pidatoku **Laksana Malaekat jang menjemput dari langit, djaianja revolusi kita** (Djajaj) kutandakan perijunya, mungkinja dan dapatnja bertentangan dengan Nasionanisme, Agama dan Komunisme; harus satunja kata dan perkuatian bagi kaum jang bertentangan dengan Revolusioner; mutiak perijunya dilaksanakan landjut form sebagai bagian mutiak Revolusi Indonesia; mutlak perijunya dibasmi segala phobi-phobian terutama sekali komunisto-phobi; perijunya dikonfrontasikan segenap kekuatan nasional terhadap kekuatan imperialis-kolonialis; dan keharusannja didjalani revolusi dari atas dan dari bawah.

1961.

Dalam pidatoku **Revolusi-Sosialisme Indonesia** **Pimpinan Nasional (Resopim)**, kuketengahkan perijunya meresapkan adiinja Amanat Penderitaan Rakyat agar meresap puia tanggung-djawab terhadap rakyat serta mustahilnja perdjaoangan besar kita berhadapan tanpa Tritunggal Revolusi, ideologi nasional progresif dan pimpinan nasional.

1962.

Dalam pidatoku **Tahun kemenangan** (Taklukan) kulantjarkan gagasan untuk memperhebat pekerdjaan Front Nasional, untuk menumpas perongrongan revolusi dari dalam, dan bahwa revolusi kita itu merupakan alam satu „selfpropelling growth” — satu, jaitu berdjau atas dasar kemandjuaan, mekar atas dasar kemandjuaan.

963.

Dalam pidatoku **Genta Suara Revolusi Indonesia** (*esuri*) kulantunkan peringatan bahwa „tiada Re-
volusi kalau ia tiada mendjalankan konfrontasi
„terus-menerus” dan „kalau ia tidak merupakan satu
siplin jang hidup”, bahwa diperlukan „puluhan ribu
der disegala lapangan”, bahwa Dekon harus dilak-
nakan dan tidak boleh diselewengkan karena
Dekon adalah maniolnja ekonomi”, bahwa abad
ta ini „abad nefo” dan saja mengambil inisiatif
tuk menjelenggarakan Conefo; dan akhirnya tahun
ng lalu :

964.

Dalam pidatoku jang terkenal, **Tahun Vivere**
ricoloso (Tavin), kuformulasikan „6 hukum Re-
volusi”, jaitu bahwa Revolusi harus mengambil sikap
pat terhadap lawan dan kawan. harus didjalankan
ri atas dan dari bawah, bahwa destruksi dan
nstruksi harus didia'ankan sekaligus, bahwa tahap
utama harus diramponkan dulu kemudian tahap
dua, bahwa harus setia kenada Program Revolusi
ndiri jaitu Maniol, dan bahwa harus runia soko-
ru, punya pimpinan jang tepat dan kader² jang
pat; dimoa kuformulasikan Trisakti „berdaulat dan
n politik, berdikari dalam ekonomi dan berke-
ribadian dalam kebudayaan”.

Nah, kawan-kawanku setjita-tjita,

Dari semuanya ini dielaslah, ia, dari pengalaman
sesung kita selama 20 tahun ini dielaslah, bahwa
evolusi kita terus-menerus madiu, terus-menerus
meningkat. Madiunia sudah barang tentu bukan ma-
u dengan gampang, meningkatnja sudah barang
entu bukan meningkat tanpa korbanan. Segala ke-
hitan dan kesakitan jang ada didunia ini sudah kita
ami. Pukulan², gempuran², kesalahan², kekalahan²,
rban² niawa — s e m u a sudah kita alami. Kita
alahan mengutjapkan sjukur alhamdulillah bahwa
a telah mengalami segalanya itu. Sebab, djika
lak, sudah pasti kita ini akan menjadi bangsa
ng biasa kusebut bangsa-kintel atau bangsa-tujul,
nusa jang barangkali suka hidup tetapi takut ke-
da kesukaran hidup, bangsa jang tjuma mau anak
dia, jang nerimo makan enak, sekalipun makannja
ditjekoki, ditjekoki oleh orang lain. Tidak ! sjukur
hamdulillah, kita ini b u k a n bangsa jang demikian
! Kita bukan sematjam rumput, — kita adalah
hon beringin jang besar ! Kita bukan kambing,
a bukan bebek — kita garuda, kita banteng jang
aha dahsjat !

Berkat djerih-pajah kita selama 20 tahun ini, berkat
nderitaan jang Saudara-saudara semua alami se-
ma 20 tahun ini, maka kita sekarang bukan bangsa
ng dalam tatahidup internasional tidak-masuk-
ku. Kita sekarang bangsa jang dihormati oleh
wan² kita dan disegani oleh lawan², ditakuti oleh
van² kita. Kita sekarang bukan hanja bangsa jang
perhitungkan, tetapi kita **sangat** diperhitungkan.
matlah betapa pers imperialis kehilangan-kepala
nghadapi kita dan betapa segala kata² kotor masuk

kehalaman² surat kabar² mereka itu djika membitjara-
kan kita. Tetapi lihatlah pula betapa pers sahabat²
kita mengapresiasi perdjolongan kita dan hasil² kita.
Ini bukti, bahwa kita berada didjalan jang benar !

Dari mimbar ini biarlah saja berseru kepada pers
imperialis supaja kampanienja jang anti — Indonesia
itu **djangan**, djangan diberhentikan, sebab kampanje
itu menguntungkan kita dan membantu kita ! Kepada
pers negara² sahabat jang benar² bersahabat dengan
kita, saja mengutjapkan terima kasih atas segala kata²
baik mereka, jang mendorong kita dan memberi
inspirasi kepada kita. Saja harap, sahabat² kita itu
tidak segan² mengkritik Republik Indonesia djika
mereka melihat kekurangan² pada kita.

Pada hari raya dwi-dasawarsa Proklamasi
Kemerdekaan ini, Republik kita menerima ribuan
kawat dan surat dari luar negeri maupun dalam
negeri. Jang dari luar negeri itu datang praktis dari
seluruh pelosok dunia. Dari mimbar ini saiapun ingin
menjampaikan terima kasih Republik dan Rakyat
Indonesia, terimakasih Pemerintah Republik Indo-
nesia dan saja pribadi atas segala pernyataan simpati
jang benar² mengilhami kita itu. Seperti halnja 20
tahun jang silam ini, djuga diwaktu-waktu jang akan
datang Republik Indonesia tidak akan gagal memce-
nuhi tugas² internasionalnja — menjokong se-
tiara perinsipil dan dengan segala-sesuatu jang
mungkin kami berikan kepada setiap perdioangan
kemerdekaan, dimanapun dan oleh siapun per-
dioangan itu dilakukan. Sebab, dengan menjokong
perdioangan-perdioangan itu sesungguhnya Republik
Indonesia menjokong dirinya sendiri, urusannja sen-
diri, tjita² kemerdekaannja sendiri.

Hari ini hadir ditengah-tengah kita kawan²
senerdioangan kita dari berbagai negeri. Mereka
ada jang duduk dibelakang saia di Istana Merdeka,
ada jang duduk dibelakang saia ini, dimimbar ini,
jaitu kawan kita P.J.M. Stoica, Presiden Rumania.
Hadir disini exponen² dari Afrika revolusioner; dari
Amerika Latin revolusioner; dari Asia revolusioner;
hadir pula disini wakil² dari Erona. Mari kita utjap-
kan terimakasih dan salut kita kepada mereka !

Saudara-saudara sekalian.

Saja mau menoadjak Saudara-saudara hari ini
untuk bernikir dalam ukuran jang lebih luas,
berfikir dengan saiap-sajap — fikiran jang lebih
lebar. Ketika dasawarsa pertama Republik kita,
saia mengundang Saudara-saudara untuk me-
mikirkan apa-apa jang akan kita hadapi dalam
dasawarsa jang mendatang. Kali ini, saja mau meng-
adjak Saudara-saudara untuk memikirkan sekurang-
kurangnja soal² jang kita hadapi dalam 20 tahun
jang akan datang.

Ulang-tahun ke-20 Hari Kemerdekaan kita ini
benar² satu **mijlpaal**, satu **tonggak** sedja-
rah dalam perdjalanan kita sebagai bangsa-negara.
Bagaimana hal ini mungkin? Sebabnja, Saudara-
saudara, karena pada hari² Agustus 1945 kita bangsa
Indonesia tahu menangkap kans, berani menangkap

kans, berani menggunakan momentum itu. Seandainya pada waktu itu kita pertjaja kepada Sekutu atau pertjaja kepada djandji² Djepang, maka rasanja kita tidak akan pernah merdeka! Bukankah aku sendiri didalam lahirnja Pantja Sila djangan kita ndjelimet, karena kalau kita ndjelimet kita tidak akan pernah merdeka? bukankah didalam pidatokan itu aku mengibaratkan penentuan kemerdekaan itu seperti mengambil keputusan perkawinan — bahwa djangan menunggu gedung, djangan menunggu permadani, djangan menunggu tempat tidur jang mentul², djangan menunggu medja kursi jang selengkap²nja, djangan menunggu sendok-garpu perak satu kaset, dan djangan menunggu punja kinder uitzet dulu, baru mau kawin, melainkan aku katakan ketika itu, orang sudah bisa kawin dengan satu gubuk satu tikar dan satu periuk? Bukankah aku djuga katakan ketika itu bahwa ketika memutuskan Revolusi Oktober Lenin boleh dibilang tidak punja apa², tidak punja Dineproetrovsk jaitu dan besar di sunzai Djnept, tidak punja stasion radio, tidak punja kereta api, tidak punja creches?

Ja, Saudara-saudara ketika itu bukan sadja ramalanku tentang perang Pasifik sudah mendjadi kenjataan, tetapi malahan ramalanku tentang a n a k n j a. Perang Pasifik itu jaitu I n d o n e s i a M e r d e k a sudah mendapatkan sjarat² dan kondisi²nja. Kita bukan bangsa jang tjuma berani berdjoang tetapi takut menang, tidak! Kita berani berdjoang dan kita djuga berani menang! maka dari itu setelah mengadakan persiapan² seperlunja dengan mendapatkan bantuan jang sangat berharga dari gerakan² massa, terutama sekali gerakan² pemuda revolusioner ketika itu, sajumpun pada pertengahan bulan Agustus 1945 itu dengan tidak ragu² memutuskan untuk menjatakan atas nama bangsa Indonesia k e m e r d e k a a n I n d o n e s i a.

Di Eropa Timur pada waktu itu; berkat perdjoangan kaum partisan negeri² Eropah Timur dan berkat bantuan aktif Tentara merah Uni Sovjet, sedjumlah negeri melepaskan diri dari ikatan imperialisme dan mendirikan negara² merdeka jang mereka namakan Demokrasi Rakjat. Tetapi di Asia, Indonesia termasuk negeri jang paling pertama melemparkan belunggu imperialisme kedalam lautannja sedjarah dan jang menegakkan satu Republik jang — seperti tertjantum didalam Mukadimah Undang² Dasar 1945 kita — azasnja „merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur” dan jang berdasar kepada Pantja Sila. Sekitar waktu itu beraksi pula kawan² kita di Vietnam dan Korea — Vietnamnja Ho Chin Minh dan Koreanja Kim Il Sung Keruan sadja rentetan revolusi² di Asia itu menggontjangkan bukan sadja Pasifik dan Asia, tetapi bahkan menggontjangkan seluruh dunia oleh sebab itu, Saudara² kalau sekarang kita membina satu poros anti imperialis, jaitu poros Djakarta — Pnompenh — Hanoi — Peking — Pjongiang, djanganlah, dikira bahwa poros ini poros bikin-bikinan, tidak — poros ini poros jang paling wadjar, jang dibentuk oleh dialannja sedjarah itu sendiri!

Republik Indonesia sendiri mengalami gelombang-pasang — gelombang-surut — gelombang-naik — gelombang-turun. Tetapi a r u s - p o k o k daripada Republik Indonesia itu adalah arus pasang, arus naik, arus maju, arus ofensif, arus kemenangan!

Ada saat², jang karena kita kurang waspada terhadap djarum perpetjahan jang ditusukkan oleh kaum imperialis dan kaum reaksioner didalam negeri, hampir² sadja Republik kita tertimpa bentjana kehantjuran. Pedih hatiku, pada saat² jang begitu itu, karena djika Republik dirobek², hatikupun rasanja seperti dirobek-robek!

Tetapi dengan pedih-hati atau pilu-hati sadja orang tidak mungkin memetjahkan soal². Maka dari itu, pada saat² jang demikian itu selalu aku prihatin, selalu kupeladjar sebab² dan masalah²nja dengan teliti, dengan bimbingan arah orientasi jang tepat, dan manakala sjarat²nja sudah tersedia, selalu aku mengambil keputusan, ja, selalu aku bertindak, bertindak sekali lagi bertindak. Sebab, pada instansi jang terakhir, nasib-sedjarah sesuatu bangsa itu ditentukan oleh tindakan² jang tepat, jang diambil pada saat jang tepat. Disinilah dituntut kepemimpinan kita kenegarawan kita! Jang sudah djelas, Saudara² segala keputusan dan tindakan itu harus selalu kita ambil dengan hati jang teguh laksana gunung karang!

Diwaktu kita mengagungkan Revolusi Agustus sekarang ini, jang paling penting adalah untuk menarik peladjaran jang perlu² dari segala pengalaman kita 20 tahun ini, jang manis maupun jang pahit. Benar sekali pemimpin² jang mengatakan bahwa praktek adalah ibu daripada segala teori, bahwa pengalaman itu guru jang paling bidjaksana. Bahkan aku sendiri selalu mengatakan bahwa kegagalan itu ibunja sukses, kekalahan itu ibunja kemenangan. Ambillah misalnja pengalaman berunding dengan kaum pendjajah. Kita tahu dari sedjarah, bahwa Diponegoro jang tidak bisa ditundukkan dimediasi pertempuran, achirnja didjebak diruang perundingan. Tetapi pengalaman Diponegoro itu buat kita merupakan pengalaman tidak langsung, sedang selamanya pengalaman tidak langsung itu tidak munek-munek meresap seperti halnja pengalaman jang langsung.

Seandainya kita tidak pernah membikin kesalahan diatas bukit Linggardjati dan diatas kapal Renvill barangkali kita djuga masih naif dalam berunding dengan kaum imperialis. Karena kita beladjar dari pengalaman itulah maka kita sekarang tidak naif. Sehingga, diwaktu utusan Pemerintah Amerika Serikat tuan Ellsworth Bunker datang kemari, maka dalam persetudjuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Amerika Serikat bukan kita jang tunduk, saudara², tetapi. „Peace Corps” Amerika diputuskan harus keluar dari Indonesia! Ini merupakan peningkatan kedewasaan kita dalam menghadapi imperialisme!

Semuannya ini membuat kita djuga mengerutkan dahi. Saudara², mengapa Republik Demokrasi Vietnam tidak sudi berunding dengan Amerika Serikat ja

erus sadja main bom dan main roket, pendeknja, erus sadja main agresi. Perginja Perantjis dari Indo-ina bukannya ditentukan di Fauntainebleau, tetapi i Dien Bien Phu! Seperti bebasnja Irian Barat empo hari — selalu ini aku katakan — tidak di-entukan di London tidak di Moskow, tidak di Washington, tidak di P.B.B., tetapi dirimba-rimba di rian Barat.

Begitulah, setiap pengalaman itu berguna dan ber-are, asal kita peladjar, asal kita bisa menjim-ulkan!

Marilah pada saat² jang bahagia ini kita belajar ebaniak-banjaknja dari Agustus jang agung, belajar endiri² maupun belajar bersama². Sekarangpun eladjaran jang bisa kita timba dari pengalaman 0 tahun ini luar biasa banjaknja, **Lu a r b i a s a !** an dengan pasti aku bisa mengatakan bahwa pel-ajaran itu tidak akan kundjung habis!

Kelak, saudara², manakala kita sudah lebih djauh erdiarak dari masa sedjarah sekarang ini, peladjaran ng bisa dan jang akan ditimba orang akan lebih anjak lagi. Ahli² sedjarah, sardjana² lain, politikus², astrawan², seniman², djurnalis², semuanya kelak kan mempeladjar sedjarah kita, zaman kita, evolusi kita. Dan dengan menggeleng-gelengkan enala mereka akan berkata dengan takdjub: **Hebat! Hebat Republik Indonesia itu! Bagaimana alam masa sependek itu bisa ditunaikan hal² sebesar u!** Sedarilah, Saudara-saudara, insjafilah, bahwa ngkau, dan engkau, dan engkau, dan engkau — emuanya dan masing², ambil bagian dalam proses edjarah jang besar ini. Seperti berkali² aku peringat-an, djanganlah ada diantara kalian jang berpikir Ach, aku toch tjuma satu orang sadja, tanpa aku erdjuangnja juga berdjalan”, lalu orang itu lebih uka thenguk² dan onkang², sedakep. Revolusi kita ni begitu dahsjatnja, sehingga tidak ada satu keluar-apun, tidak ada satu machlukupn jang tidak tersang-ut didalamnja. Atau orang memihak revolusi dan ut berrevolusi, atau orang menolak revolusi, me-entang revolusi dan diganjang oleh revolusi! Jang etral tidak ada, dan tidak mungkin ada!

Duapuluh tahun, Saudara², kita telah merdeka! Duapuluh tahun ini bukan masa sembarangan. Dua-uluh tahun ini duapuluh tahun jang bagaimana! alau direnung-renungkan, bahwa dalam periode 20 un tahun ini kita berhasil menegakkan satu Republik esatuan jang sentausa, dengan segala sarana²nja — rmasuk Angkatan Bersendiata — jang kuat, kita erhasil mengalahkan agresi² imperialis dan berbagai² ontra-revolusi, memulihkan keutuhan wilajah, dan ng sangat amat penting, menggugah kesedaran akjat sehingga Rakjat kita mendjadi Rakjat gem-engan seperti sekarang ini, jaitu **Rakjat jang ber-tu dan mengembangkan persatuan, Rakjat jang ber-oang dan menembangkan perdjoangan** — maka udang² aku sendiripun keheran-heranan bagaimana galanja ini mendjadi mungkin, dan bagaimana aku ndiri bisa memberikan pimpinan jang dikhendaki! tapani, Saudara², seperti berulang kali kutundjuk-

kan, sedjarah mempunjai hukum² jang objektif. Seandainja kita pemimpin² Republik Indonesia jang sekarang ini gagal, karena kita buta akan hukum² objektif sedjarah itu, maka tentu sedjarah akan me-lahirkan pemimpin² jang lain bagi bangsa Indonesia. Tetapi karena kita memahami hukum² objektif se-djarah itu, dan karena kita setia berdjalan diatasnja hukum² objektif itu, maka kita bisa mendjalankan tugas² raksasa jang dipikulkan oleh sedjarah keatas pundak kita. Kita, malahan, asal kita setia kepada hukum sedjarah dan asal kita bersatu dan memiliki tekad badia, kita bisa memindahkan gunung Semeru, gunung Kinibalu dari sana kesini!

Hari ini kita berhimpun didepan Istana Merdeka dibawah Tugu Nasional jang megah dan dihadapan Patung Pahlawan Diponegoro jang gagah, disaksikan oleh matahari jang riang-gembira dan bermiljard² mata sahabat² jang penuh simpati dari segala pen-djuru angin. Untuk apa? Untuk mengadakan perhi-tungan, afrekening dengan masa silam kita. Sebab, selalu satu bangsa berdiri ditengah-tengahnja masa silam dan masa depan. Bilamana bangsa itu tidak tiap² kali mengadakan perhitungan dengan masa silamnja, bilamana bangsa itu tidak bertekad me-numpas segala jang negatif dan mengembangkan segala jang positif dari masa silamnja, maka bangsa itu tidak akan mungkin membina, membimbing, tidak mungkin membangun masa-depannja.

Kita mengadakan pertanggungan-djawab, kita mengadakan perhitungan, kataku, karena sesungguhnya sebagai satu bangsa jang berdjombang kita ini sudah mengalami kristalisasi. Seperti gadis pen-ampi, sedjarah telah memisah-misahkan, telah memilah-milahkan emas dari lojang, sari dari ampas. Pertanggungan-djawab ini bahkan tidak hanja ku-persembahkan kepada bangsaku jang mendjadi djundiunganku, tetapi djuga kepada semua kawan² seperdjoangan diluar negeri, kepada seluruh kekuatan Nefo didunia, sebagai bahan konsultasi. Karena achir-nja, achirnja antara revolusi Indonesia dan revolusi² mereka djuga harus diadakan suatu dialog, agar ber-sama-sama kita bisa menjempurnakan kita punja seranan², kita punja serbuan² kebenteng² nekolim. Siana sadja boleh memberikan evaluasi, boleh mem-berikan penilaian terhadap hasil² revolusi Indonesia. Djuga lawan² kita, dan djuga kalau penilaian mereka itu seburuk-buruknja, penilaian itu akan welkom bagi kita, karena ini akan merupakan bahan konfrontasi antara fikiran² lapuk dunia — lama dan fikiran² segar dunia baru.

Ber-kali² kukatakan bahwa abad ke-XX ini abad berachirnja imperialisme dunia. Sudah terlalu lama „pak imperialistica” menindas — menghisap — memperbudak kita, dan genta sedjarah sudah ber-denting bahwa saatnja penjusunan Pax Humanica telah tiba! Ja, Pax Humanica! Damai antara semua manusia! Selamat tinggal „pax imperialistica”, selamat tinggal buat selama-lamanja! Selamat datang Pax Humanica, selamat datang buat selama-lama-nja pula!

Didepan Sidang M.P.R.S. sudah kutundukkan hukum dialektika jang akan membalikkan „garis-hidup” imperialisme mendjadi garis-mati daripada imperialisme itu. Karl Marx benar sekali ketika meramalkan bahwa proletariat, „anak-kandung” kapitalisme itu, akan mendjadi penggali liang-kuburnja. Sekarang kita semua, ja proletariat, ja kaum tani, ja kaum tertindas lainnja, kaum jang kunamakan kaum Marhaen, dan semua nasion² tertindas didunia ini, bersama-sama dan serempak mendjadi penggali liang-kuburnja imperialisme. Tidak ada kehormatan jang lebih besar daripada ini, Saudara-saudara!

Sesudah detik² Proklamasi 20 tahun jang lalu, belum pernah aku bangga seperti hari ini, belum pernah aku terharu begitu intens seperti hari ini! Lihatlah mata Rakjat Indonesia — sinarnja lebih tjemerlang daripada matahari! Lihatlah tekad Rakjat Indonesia itu — teguhnja lebih perkasa daripada kerasnja badja!

Ja, hai imperialis, hai imperialis, Rakjat Indonesia tidak mungkin kaukalahkan lagi, tidak mungkin dikalahkan lagi, aku sudah akan besar-hati sekali. Tetapi bukan itu sadja, Saudara², bukan hania itu sadja! Rakjat kitapun akan mengalahkan imperialis! Rakjat kita akan menang!

Hai imperialis, kami jang akan menang, bukan engkau!

Kesalahan kaum imperialis dan kaum reaksioner umumnja adalah, bahwa mereka meremehkan Rakjat jang diembel, meremehkan Rakjat dijelata. **Malahan ada diantara pemimpin² Indonesia jang baru merasa krasan kalau merada ditengah-tengahnja ndoro-den-aju-ndoro-den-aju dan raden mas raden mas atau berada diantara direktur² kapitalis birokrat, atau diantara tuantanah-tuantanah atau lintah-darat². Memang ada pemimpin revolusioner dan ada pemimpin² reaksioner, ada pemimpin sedjati, dan ada pemimpin gadungan!**

Bukan salahnja Rakjat kalau kaum imperialis babak-belur menghadapi Rakjat, bukan salahnja Rakjat kalau kaum imperialis babak-bundas di Indonesia, di Vietnam, di Konggo, di Dominika dan dimana². Sebab mereka selalu mengukur Rakjat itu dengan ukuran kolonial, dengan ukuran pound-sterling, dengan ukuran dollar. Mereka, seperti rentenir, menghitung² di Asia Tenggara ada beberapa djuta Rakjat, di Timur Tengah ada berapa djuta Rakjat, di Afrika ada berapa djuta Rakjat, di Amerika Latin ada berapa djuta Rakjat, di Oseania ada berapa djuta Rakjat. Dan mereka berkata: „Kasih mereka sekian djuta dollar, habis perkara”.

Mereka tidak tahu, bahwa kalau ada mata-uang jang paling merosot nilainja sekarang ini, mata-uang itu adalah djustru pound-sterling dan dollar! Ja, barangkali ada jang tidak pertjaja akan apa jang aku katakan? Tengoklah: dizaman „Plan Marshall” untuk 100 djuta Rakjat Eropa Timur dikeluarkan 100 djuta dollar untuk subversi. Tapi sekarang, untuk

mensubversi 200 djuta Rakjat Asia Tenggara dikeluarkan — 200 djuta dollar? Bukan, bukan 200 djuta dollar, tetapi dikeluarkan 1.000 djuta dollar. Artinya paling sedikit dollar itu sudah merosot 5 kali! Tapi dollar itu tidak menghasilkan simpati dan persahabatan terhadap Amerika Serikat, sebaliknya dollar itu seperti memantiing antipati dan permusuhan dari Rakjat² Asia Tenggara. Ataukah barangkali orang Asia lebih mahal daripada orang Eropa!

Selama kita teguh dalam menegakkan kemerdekaan nasional kita, dan selama didunia ini ada jang bernama imperialisme, maka selama itu kita harus siap menghadapi subversi, intervensi dan agresie kaum imperialis.

Sebab, tidak akan pernah kaum imperialis itu memerkenankan kemerdekaan tipe Soekarno, kemerdekaan tipe Norodom Sihanouk, atau kemerdekaan tipe Mao Tse-Tung, ataupun kemerdekaan tipe Boumedienne, atau tipe Hafez, atau tipe Nasser, atau tipe Sekou Toure, atau tipe Modibo Keita, atau tipe Nkrumah, atau tipe Nyerere. Mereka paling memerkenankan, malahan merestui „kemerdekaan” tipe Tjiang Kai-sek, tipe Pak Jung Hi, tipe Kv, tipe Tsombe, tipe Tengku Abdulrahman Putra. Tetapi ada baiknja bahwa kaum imperialis mendiajagi diajoni seperti Tjiang Kai-sek dan lain² itu, sebab, anasir itu anasir² jang paling korup didunia ini, sehingga bantuan dollar berapa sadja baniaknja mereka sikat sendiri dan tidak ada atau sedikit sekali jang mereka pakai untuk melawan revolusi. Ja, Saudara², boneka imperialispun menguntungkan kepada kita!

Kitapun, Saudara², kitapun djangan memaklukkan ukuran salah untuk revolusi kita sendiri. Revolusi hania bisa diukur dengan ukuran revolusi! Revolusi tidak bisa diukur dengan ukuran text-books, sekalipun jang ditulis oleh profesor² botak di Oxford, dan Cornell University atau dari mana sadja. Rasanja aku masih perlu menandas-nandakan hal ini, karena masih ada sadja jang menganggap text-book imperialis itu sebagai standard fikiran jang dikramatkan, sacrosanct jang tidak boleh diganggu gugat..... Apakah „mission sacree” atau „white man’s burden” kaum imperialis itu „Hukum Ilahi”? Heh, kira², dong, bung, kira², dong! Meleklah, ha kaum jang tersesat!

Bagaimana mengukur sesuatu revolusi dengan ukuran² revolusi? Segala — sesuatu hendaknja diamati: untuk kesedjahteraan umum, ja atau tidak. **Pro bono publico** — inilah sembojan kita. Artinya pro bono publico, untuk kesedjahteraan umum. Sekalipun ada jang setjara pribadi dirugikan, sekalipun ada jang laba perusahaannja berkurang, tapi asalkan pro bono publico, maka ia harus diterima. Sebaliknya, walaupun ada jang tambah mobil, tambah bungalow, tambah koelkast, tambah air-conditioning, walaupun ada jang bisa menjekolahkan anaknja ke Eropa atau ke „djabalkat” sekalipun, tapi jika tidak pro bono publico, maka ia harus ditolak. Ketjuali-ketjuali, kataku — djika orang sudah mendjadi orang asing ditanah air sendiri, atau sud

djadi orang pribumi dinegeri asing! Ja, ketjuali a orang sudah tjidera, sudah durhaka, sudah nat terhadap urusan revolusi!

ihatalah kepada kaum buruh dan kaum tani, nguru² revolusi kita itu! Mereka memang pantas, ias, tepat kusebut sokoguru revolusi! Mereka erdja, mereka menghasilkan, mereka berpro- si, tanpa mengeluh dan tanpa banjak tjingjong. eka mempunjai tuntutan² mereka — sudah ba- g tentu — tetapi tuntutan² itu biasanja masuk- t. Kalau kaum buruh ingin supaja upahnja bisa : sedikit untuk membeli buku-sekolah untuk anak- apakah itu tidak masuk-akal? Kalau kaum tani ghasratkan tanah, „senjari bumi”, apakah itu uk-akal? Aku teringat kepada seniman² ludruk haen jang mengatakan „la kalau punja patjul ndak punja tanah, kemana patjul itu mesti tjlukan!” Tetapi ada diantara kita ini jang naar revolusi, mengira dirinja presdir Republik, maunja bukan dia berkorban buat Republik, Republik berkorban buat dirinja!.....

orang² sematjam ini, parvenu² charlatan-charla- profitor² matjam ini ada baiknja kita promovir djadi penghuni Nusakambangan!

aja selalu mengatakan bahwa perdjoangan kelas is ditundukkan kepada perdjoangan nasional. u aku gembira bahwa djeritanku ini difahami oleh gian sangat terbesar dari Rakjat. Tetapi aku u peringatkan, kalau koruptor² dan pentjoleng² ajaan negara meneruskan „operasi” mereka jang ngguhnja anti-Republik dan anti-Rakjat itu, a djangan kaget djika satu waktu perdjoangan ar-golongan berkobar dan membakari kemewahan p kaum koruptor dan pentjoleng itu!

Revolusi kita sekarang sudah tidak dalam taraf jobaan, sudah tidak dalam taraf eksperimen. Kita k boleh main eksperimen atau main tjoba² lagi. ratnja kesebelasan sepakbola, tidak boleh kita pasang pemain² jang belum „djadi”, jang belum ang. Revolusi kita sudah menemukan vormnja, taraf ini meletakkan pada kita sjarat² baru, utan² baru, ukuran² baru.

Mereka jang kemarin progresif, hari ini mungkin djadi retrogresif, anti-progresif, jang kemarin olusioner, hari ini mungkin mendjadi kontra- olusioner; jang kemarin radikal, hari ini mungkin djadi melempem. Maka itu, Saudara², djanganlah atara kita ada jang mengagul²kan djasa diwaktu pau sadja. Kalau saja memakai bahasa Belanda, berkata: Ik walg van al die oude koek! Ja, nja aku muak, muak, mau muntah, kalau men- garkan omongan orang jang mau djasa, djasa, a sadja. Biar engkau dulu djendral — petak di n 1945, tetapi kalau sekarang memetjah peran nasional revolusioner, kalau sekarang menga- kan front Nasakom, kalau sekarang memusuhi nguru² revolusi, engkau mendjadi tenaga reaksi! aliknja, biar engkau dulu bukan apa², ja, biar rang engkau bukan apa², tetapi setia kepada lusi, engkau tenaga revolusioner! Tenaga² ma- inilah, laki² maupun perempuan, tua maupun

muda, tinggi maupun rendah, tenaga² revolusioner matjam inilah jang tanpa ketjualinjaku „samenbun- delen”, kugabungkan mendjadi satu, agar mendjadi satu tenaga raksasa, „kadya prahara angguntjan² samudra”!

Sedjak matinja Roosevelt, Stalin dan Churchill, dunia kita sedikit sekali mengenal pemimpin² besar. Dulu, diwaktu — mudaku, ketika aku mulai mem- basuhkan diriku kedalam gerakan kemerdekaan, kukenal nama² jang besar². Tetapi banjak dian-ara mereka itu jang kini tidak terkenal lagi. Sebagian karena wafat terlalu tjepat, sebagian lagi karena tidak setia kepada djalan revolusioner jang sekaii pernah mereka pilih sendiri. Kesetiaan kepada djalan revolusioner adalah sjarat pertama bagi seseorang untuk bisa terus didalam gerakan dan untuk memain- kan peranan tertentu didalam gerakan itu.

Revolusi itu selalu mempunjai alat² materiil dan alat² spirituil sekaligus. Alat² materiil itu ada jang sederhana, ada jang modern, ada jang up-to-date, ada jang kurang sesuai dengan apa jang dinamakan up-to-date. Aku tahu, tiap² kali aku sebagai Pang- lima Tertinggi Angkatan Bersendjata memper- modern persendjataan keempat² Angkatan Bersen- djata kita, atau djika Republik Indonesia membuka lin penerbangan kedjagat luar atau mempermodern alat RRI dan TVRI kita, pers imperialis selalu mengedjek aku dengan menulis bahwa aku membangun — demikian kata mereka — „projek² prestise”. Ini adalah pembedutan djurnalistik dan pembedutan politik sekaligus jang amat djenaka! Kaum imperi- alis jang memang masih punya dollar dan punja bom nuklir dan lain², tapi sudah tidak punja prestise lagi itu, ho ho, mereka itu, kaum imperialis, membitjarakan prestise kita! Monumen Nasional djuga „projek prestise”? Djalan Trans Sumatera djuga „projek prestise”?

Terimalah, wahai Rakjat di Sumatera „projek prestise” ini dengan tangan dan hati terbuka, sebab memang prestise Sumatera akan naik karenanja! Dan tjatatlah, wahai wakil² pers Barat, bahwa aku Insja Allah Swt. akan membikin pu'a projek² besar lainnja di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku, di Nusatenggara, di Irian Barat!

Republik Indonesia sudah memberantas buta huruf — ini djuga „projek prestise”? Republik Indonesia memetjahkan masalah kesehatan, masalah pendidi- kan, masalah pangan, dan lain² tanpa P.B.B. — ini djuga „projek prestise”? Republik Indonesia sudah meluntjurkan roket ionosfirnja — ini djuga „projek prestise”? Prestise apa dan siapa? Ja, pres- tise kemerdekaan dan prestise Rakjat kita jang mer- deka! Dan kemerdekaan ini akan kita bela mati²an, mati²an, kalau perlu — seperti pernah kukatakan — kita bela kemerdekaan itu dengan bom atom, kita bela kemerdekaan itu dengan bom atom! Tetapi djangan lupa, bahwa kekuatan Rakjat, persatuan Rakjat, perdjoangan Rakjat itu djuga satu bom atom, malahan lebih hebat daripada bom atom! Ja, djangan dikira bahwa alat² atau sendjata²

spirituul kita itu kalah daripada alat² atau sendjata² materiil kita. Alat² materiil, teknik, dan lain² itu malahan tidak pernah lebih daripada sekedar alat. Alat ini harus diperalat, dan siapa jang memperalat? Jang memperalat ialah politik kita, ideologi kita, Revolusi kita! Dan djangan dibalikkan Saudara-saudara.

Tanggal 25 Djuni jang lalu, selaku Pemimpin Tertinggi Front Nasional aku telah mengeluarkan sebuah Instruksi 5 pokok, jaitu :

- Satu** : Mempertinggi kewaspadaan dan kesiapa-siagaan nasional;
- Dua** : Mengutamakan disiplin dan tanggung-djawab nasional;
- Tiga** : Memperkokoh persatuan nasional dengan mengamalkan djiwa Deklarasi Bogor dan tatakrama Nasakom;
- Empat** : Menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan golongan dan perseorangan; dan
- Lima** : Meresapkan dan mengamalkan „Lima Azimat” Revolusi Indonesia :
Nasakom, Pantja Sila, Manipol/Usdek, Trisakti Tavip, dan Berdikari.

Aku gembira sekali bahwa sedjak saat itu hingga sekarang Instruksiku itu memang didjalankan, sehingga ke-lima² pokok itu memang diamalkan dalam ama-perbuatannja masyarakat.

Terutama semakin meresapnja „Lima Azimat” Revolusi memang sangat menggembirakan sekali, sangat membesarkan hati. Gagasan²ku itu — Nasakom (1926) Pantja Sila (1945), Manipol/Usdek (1959), Trisakti Tavip (1964) dan Berdikari (1965) — sebenarnya hanjalah hasil penggalianku, jang dua pertama dari masyarakat bangsaku, dan jang tiga terachir dari Revolusi Agustus. Aku mengutjapkan terima kasih kepada Saudara² jang telah menganggap kelima-lima idee-ku itu sebagai azimat² Revolusi. Tidak ada kebahagiaan lebih besar bagi seseorang revolusioner selain mengetahui bahwa idee²nja sesuai dengan tuntutan² revolusi !

Aku meminta kepada Saudara² agar supaja ke-lima² pokok dalam Instruksiku itu terus disebar²kan, diresapkan, diamalkan, sebab dari terlaksana-tidaknja Instruksi itu tergantung pula baik — tidaknja Front Nasional dihari² jang akan datang, baik-tidaknja persatuan bangsa dihari² jang akan datang.

Baik Nasakom, baik Pantja Sila, baik Manipol/Usdek, baik Trisakti, maupun Berdikari itu kesemuanja mengabdikan kepada persatuan nasional revolusioner, artinja, mengabdikan kepada kepentingan revolusi. Semuanja alat pemersatu, semuanja alat revolusioner ! Kalau beberapa waktu jang lalu kukatakan agar kita „berdjiwa Nasakom” maksudku adalah agar kita berdjiwa persatuan revolusioner, agar kita semua gandrung kepada persatuan revolusioner. Kita tidak tjukup hanja berdjiwa Nasakom — kitapun harus berdjiwa Pantja Sila, berdjiwa

Manipol/Usdek, berdjiwa Trisakti Tavip, berdjiwa Berdikari !

Djuga dalam hal ini pers imperialis suka mendjek Sukarno. Kata pers imperialis, kata merdjo Sukarno hanja pandai menjusun sembojan², dan hanja singkatan². Djawab saja djuga singkat sa karena, bukankah kaum imperialis sendiri merdjo bikin sembojan², membikin singkatan²? Apa itu „atom for peace”? Apa itu „atom for peace”? Apa itu „atom for peace”? Bedanja, bedanja ialah : sembojan-sembojan Sukarno diterima dan didukung Rakjat, sedang sembojan² imperialis ditolak dan kutuk Rakjat. Inilah bedanja !

Mereka bukannya membentji Nasakom karena singkatan ini terdiri dari 7 huruf; mereka djuga tidak membentji Nefo karena singkatan ini terdiri dari N, E, F dan O. Tidak ! Mereka membentji singkatan-singkatan kita, karena mereka membentji kita, ja, karena mereka takut kepada kita, ja, karena mereka takut kepada daja-kekuatannja. Ini, dan tidak lebih daripada mi, jang mereka bentji dan takuti.

Wakil² pers Barat djuga boleh mentjatat, bahwa di Indonesia lebih banjak lagi sembojan² dan singkatan² akan lahir — sembojan² dan singkatan² jang bukan sadja mendjuru-bitjarai kepentingan Rakjat, tetapi djuga mudah diingat oleh Rakjat, dan dengan demikian memberikan kearahann, gerakkan heid kepada djalannja revolusi kita. Ini merupakan garis-kerakjatan kita, ini adalah garis-massa kita !

Sembojan² itu hanjalah perumusan² jang padat, jang tjekak-aos daripada program konsepsi² revolusi Indonesia. Tidak ada didunia revolusi djiplakan. Setiap revolusi harus dan merdjo orisinil. Kalau ada revolusi djiplakan, revolusi bentji itu sebenarnya bukan revolusi, revolusi itu pasti gagal. Inilah sebabnja aku selalu menghargai kreativitas jang kreatif, jang punya idee² jang berani jang punya fantasi jang menjundul langit, jang tahu melahirkan konsepsi² jang baik.

Kita tidak bisa mendjadi revolusioner jang bentji djika kita tidak teguh dalam prinsip² revolusioner dan djika kita tidak menguasai adjaran² revolusioner. Tetapi kita djuga tidak bisa mendjadi revolusioner jang baik, djika kita tidak berdjiwa tjipta, tjajid, kreatif, tidak pandai memeras kita punya otak habis²nja. Revolusi adalah sekaligus ja ilmu ja sains. Bahkan untuk kemenangan revolusi itu sendiri, kita harus kreatif, kita harus pandai menentukan taktik perdojoangan jang supel, jang flexible, jang bidjaksana. Tetapi ! Kita tidak boleh supel atau bidjaksana dalam strategi ! Tidak boleh kita mendjadi oportunis !

Revolusi terus meningkat. Maka dari itu revolusi itu djuga mengadjukan tuntutan² jang meningkat. Itulah jang saja namakan the rising demands of revolution. Administrasi kolonial tidak memerdekakan pegawai² patriot; tjukup asal pegawai² itu ahli; dan tulis jang ahli, malahan jang lebih tidak pandai lebih baik !

Sebaliknya, pada hari² pertama atau pada tingkat pertama Revolusi kita, patriotisme itulah sjarat jang ditlak buat pegawai², sekalipun mungkin kurang li.

Tetapi sekarang, pegawai² jang tidak sekaligus triot dan ahli akan sukar mengikuti derapnja revolusi. Begitu djuga pemimpin² dan kader² revolusi. Tidak tjukup lagi kalau mereka itu hanja ndai sadja, atau hanja berwatak sadja; pemimpin² dan kader² revolusi harus sekaligus **berwatak** dan **ndai**.

Bahwa revolusi kita benar² meningkat, ini djuga antara dari hasil² kita dari tahun ketahun. Ambil periode sedjak 17 Agustus 1964 sampai 17 Agustus 1965 ini — periode antara dua 17 Agustus untuk seterusnya kunamakan **Tahun Kerdja Promasi** —, dalam Tahun Vivere Pericoloso kemenangan-kemenangan kita lebih banjak dan lebih ar daripada dimasa-masa sebelumnya.

Kemenangan² dalam Tahun Vivere Pericoloso — saja hanja menjebutkan jang paling pokok² i paling penting² sadja — antara lain adalah : uarnya Republik Indonesia dari Perserikatan ngsa² dan disedarinja pendirian bahwa mahkota merdeka sesuatu bangsa adalah bukan keang- an P.B.B., tetapi Berdikari; Ketetapan M.P.R.S. ang Banting Stir; pembubaran „BPS” serta an-koran, antek-antek dan biang keladinja; ggulungan gerombolan kontra — revolusioner ar Muzakar dan Gerungan; peranan Republik onesia dan negara² progresif lainnja dalam „KTT blok ke-II” sehingga membikin konferensi itu watak anti imperialis; Dasawarsa Konferensi Ban- ng jang bersedjarah; „KTT ketjil” di Kairo seah penundaan KAA II, jaitu diantara Republik Republik Indonesia; ambil alih maskapai² erika Serikat, dan paling achir, hanja beberapa i jang lalu, kotjar-katjirnja „Malaysia” dengan uarnja Singapura dari federasi neo-kolonial- ne itu.

Kemenangan² ini bukan kemenangan² ketjil ! kemenangan² ini hanja mungkin, karena Rakjat onesia bersatu-padu dan menjerbu kubu² musuh ana satu pasukan jang kompak, satu bandjir jang ka dahsjat, dengan disiplin jang kokoh dibawah pinan jang satu !

Tentang PBB :

PBB dalam susunannja jang sekarang tidak mung- dipertahankan lagi. Dengan menguntungkan wan dan merugikan RRT, menguntungkan Israel merugikan negeri² Arab, menguntungkan Afrika tan dan merugikan Afrika, menguntungkan alaysia” dan merugikan Republik Indonesia, njata² menguntungkan imperialisme dan meru- n kemerdekaan bangsa².

dalam tahun 1960 aku menuntut supaja PBB ul dan dipindah tempat. Sekarang tuntutanku n bahwa PBB harus mengakui kesalahan²nja dan

harus dirombak sama sekali. Kalau tidak, maka PBB bukan hanja akan ditertawai sebagai mimbar omong kosong, tetapi lebih djelek dari pada itu : PBB akan dikutuk sebagai badan jang lebih buruk daripada Volkenbond, dan malahan lebih buruk daripada semua Parlemen kapitalis digabung mendjadi satu ! Satu Parlemen kapitalis paling² „mewakili” dan meninda s Rakjatnja sendiri, tetapi PBB „me- wakili” dan meninda s Rakjat Korea, Rakjat Konggo, Rakjat Kalimantan Utara, Rakjat² djadja- han jang lain-lain !

Tentang Banting Stir :

Ketetapan MPRS tentang Banting Stir tidak hanja punja arti ekonomi. Arti ekonominja memang besar, karena kalau kita tidak banting stir, maka kita bisa makin lama makin djauh menjimpang dari Dekon.

Tetapi arti politiknya tidak kalah besarnya, sebab banting stir itu berarti djuga membanting gepeng kaum avonturir dalam politik, jang tjoba-tjoba mau menjelundupkan reformisme atau teori lain, dan jang tjoba-tjoba mau mengkisruhkan pengert- ian tentang dua tahap revolusi. Lebih² lagi, banting stir djuga punja arti pendidikan jang besar, jaitu mendidik kita untuk tidak subjektif dalam menjusun plan, tidak subjektif dalam mengurus ekonomi, pendeknja mendidik kita untuk membebas- kan diri samasekali dari setiap subjektivisme, berat- sebelahisme, serampanganisme, dll. !

Tentang „BPS” :

Sudah mendjadi rahasia umum bahwa „BPS” itu dimaksudkan untuk atas nama Sukarno-isme mem- bunuh adjaran² Sukarno dan membunuh Sukarno sendiri. Memang ada orang² jang dengan djudjur, dengan djudjur, dengan djudjur, menerima idee-idee politikku dan mengusulkan untuk menjebut adjaran²- ku itu „Sukarno-isme”, tetapi dengan „BPS” soalnya lain sama sekali. Tidak pertjuma satu surat kabar besar di Amerika Serikat mengakui bahwa pemerintahnja „terlalu tjepat” memberikan dukung- an kepada „BPS” sehingga membangkitkan ketjuri- gaan rakjat Indonesia ! Tanpa dukungan Amerika Serikatpun rakjat Indonesia tentu bisa membedakan daging dari ikan, bisa membedakan maksud baik dari maksud djahat, dan bisa mengenal sendiri apa hakekatnja „BPS” itu. Djika diingat bahwa „BPS” itu menjangkut satu rentjana djahat djelas- lah bahwa disamping soal kriminalitet politik seperti memetjah belah persatuan nasional mengatjau- balaukan pengertian Nasakom, dan lain², „BPS” djuga tersangkut perkara kriminalitet biasa. Maka dan dari itu aku tidak ragu² mengambil tindakan men-utup semua suratkabar² „BPS”. Aku djuga mau peringatkan djanganlah „BPS”isme itu jang sudah dilarang dikoran ini dan koran itu, diselundupkan masuk kekoran² lain, jang lama maupun jang baru !

Tentang gerombolan :

Pembasmian gerombolan kontra-revolusioner Kartosuwirjo, Soumokil, Kahar Muzakkar dan Ge-

rungan merupakan kemenangan² penting. Kepada prajurit² Angkatan Bersendjata dan rakjat jang ikut aktif dalam pembasmian itu saja utjapkan terima kasih jang sedalam-dalamnja. Terutama sekali „Siliwangi” besar sekali djasanja. Terbasminja gerombolan-gerombolan ini hendaklah mendjadi tjanang-peringatan bagi siapa sadja — djangan tjoba² bermain api kontra-revolusi di Indonesia ! Sudah dalam tahun 1946, jaitu dalam pidato 17 Agustus-ku 19 tahun jang lalu kuperingatkan : „Dengan pengertian jang sedalam-dalamnja serta kejakinan jang sekuat-kuatnja akan arti persatuan bangsa, maka pemerintah selalu mentjari mempersatukan, selalu menghindarkan perselisihan, selalu menundjuk kepada adjaran sedjarah „Bersatu kita teguh, bertjerai kita djatuh”. Akan tetapi dalam pada itu, pemerintah mesti memperkuat kedudukannja sebagai pemerintah..... Tiap² pengatjau, tiap² pengrusak akan berhadapan langsung dengan kekuasaan pemerintah, dan pemerintah tidak akan ragu² mengambil tindakan jang sepatasnja terhadap mereka itu !”

Tentang „KTT non-blok” :

Pendirian R.I. tentang non-alignment, jaitu tidak menjeberang sini tidak menjeberang situ, rasanja sudah tjukup djelas. Non-alignment, dalam pendapat R.I., harus bersifat anti-imperialis. Kalau tidak anti-imperialis, maka non-alignment demikian itu djadinja sudah aligned, karena ia menguntungkan imperialisme. Non-blok itu paling² bisa dalam hubungan NATO dan Pakta Warsawa, tetapi orang tidak mungkin „non-blok” dalam hubungan imperialisme dan anti-imperialisme, pendjadjah dan jang melawan pendjadjah !

Dengan konsepsi anti-nekolim jang djelas-tegas, maka delegasi Republik Indonesia jang saja pimpin sendiri memberikan sumbangan²nja jang positif kepada „KTT non-blok ke-II”, dan konferensi itu benar² telah mendjadi konferensi anti-nekolim. Non-alignment revolusioner menang, non-alignment bantji kalah ! Adapun R.I. sendiri, R.I. dikenal dunia tidak menganut „teori tiga kekuatan”, karena R.I. membagi dunia hanja dalam dua kubu, jaitu kubunja Nefo, Nefo revolusioner dan kubunja Oldefo reaksioner. Ini adalah hasil analisa jang objektif atas konstellasi dunia dewasa ini, dan maka dari itu Conefo jang Insja Allah akan kita selenggarakan tahun depan itupun objektif pula !

Tentang Dasawarsa KAA I :

Perajaan Dasawarsa Konferensi Asia-Afrika ke-I atau Konferensi Bandung telah mendjadi manifestasi perkas dari tekad anti-imperialis bangsa² Asia-Afrika. Segala fitnahan terhadap konsepsi Bandung, seakan-akan forum Asia-Afrika itu suatu forum „resialis”, forum „separatis”, forum „sektaris” serta tuduhan² lainnja, bisa kita gempur-hantjur. Melalui upatjara chidmat Dasawarsa KAA I dan atjara² lainnja, antara lain pertemuan² dan tukar-fikiran antara para utusan dari kedua benua kita, maka saling pengertian diantara semua negara² A-A jang anti-nekolim bertambah mendalam. Bukan sadja usaha

sabotase terhadap Dasawarsa itu gagal-brantak sama sekali, tetapi perajaan Dasawarsa itu sendiri merupakan sukses jang gilang-gemilang. Bagi Rakjat Indonesia sendiri Dasawarsa merupakan pendidikan politik jang teramat penting, sehingga perhatian Rakjat Indonesia terhadap masalah² internasional bertambah besar, setia-kawan mereka terhadap saudara²nja jang berdjoang untuk kemerdekaan nasional bertambah besar pula.

Tentang „K.T.T. ketjil” :

Seluruh dunia tahu, bahwa R.I. menghadiri K.A.A. II di Aldjazair dengan persiapan jang setjukup-tjukupnja. Delegasi tingkat menteri jang dipimpin oleh W.P.M. I Dr. Subandrio sudah siap di Aldjazair, sedang delegasi K.T.T. jang dipimpin sendiri hanja sampai di Kairo, karena Standing Committee K.A.A. achirnja memutuskan penundaan K.T.T. itu sampai awal Nopember jang akan datang. Bahwa kaum imperialis berusaha mati-matian untuk mentorpedo K.A.A. II itu, hal ini sudah dengan sendirinja. Hal ini ternjata antara lain dari rapat „persekemakmuran Inggris”. Tetapi lebih penting dari segalanja itu adalah perkembangan Aldjazair sendiri. Ketika Ben Bella digulingkan dan digantikan oleh satu Dewan Revolusioner, Pemerintah Republik Indonesia segera mengakui rezim baru dibawah pimpinan Houari Boumedienne, bukan hanja karena pertimbangan² K.A.A. II sadja, tetapi karena pemerintah RI menganggap perkembangan itu perkembangan progresif.

Ada pemimpin² jang takut dirinja akan „di-Bella-kan”, tapi ini hanja membuktikan bahwa mereka itu pemimpin² vested interest ! Terguling Ben Bella harus mendjadi peringatan bagi pemimpin manapun, bahwa begitu seseorang pemimpin menjauhkan dirinja dari kepentingan² Rakjatnja, beliau pasti djatuh. Kemudian, penundaan K.A.A. kami gunakan di Kairo untuk mengadakan suatu pertemuan puntjak — „le petit sommet”, jaitu tingkat tinggi ketjil, kata harian² Perantjis — diantara saudara² ku Gamal Abdel Nasser, Ayub Khan, Tjao En-lai dan saja sendiri. Hasil „K.T.T. ketjil” sudah diketahui umum, dan saja puas atas hasilnya tersebut.

Tentang modal Amerika Serikat :

Setelah ditahun 1957 kita mengambilalih modal Belanda dan ditahun 1963 modal Inggris, maka pada awal tahun ini Rakjat Indonesia — jang menghak²nja dari serangan² Amerika Serikat jang memberikan active aid kepada neo-kolonialis „Malaysia” — mengambilalih modal Amerika Serikat. Sekarang modal itu berada dibawah pengawasan Pemerintah Republik Indonesia. Ini merupakan langkah penting bagi R.I., jang dengan azas Berdikari sedang menegakkan perekonomian nasional sendiri, jang bebas samasekali dari imperialisme maupun feodalisme. Didunia dewasa ini „Sosialisme” benar² mendjadi mode. Tidak ada sesuatu pemerintah, jang tidak mau dimusuhi Rakjatnja, jang tidak menjatakan dirinja „Sosialis”. Lutjunja, dian

„Sosialisme“ itu ada jang mentah-mentahan „Sosialisme“ dengan..... modal imperialis dinegerinja ! Jang mentahan ada negeri jang samasekali belum mulai jang perubahan² nasional-demokratis, sudah mentahan jang „membangun Sosialisme“. Indonesia tidak munafik dengan Sosialismenja. Indonesia dengan sikap menjatakan bahwa revolusinja masih dalam tahap nasional-demokratis, sekalipun sedjumlah hasil ting telah ditjapai dalam tahap ini. Nanti akan jang ketikanja, jang Indonesia akan membangun Sosialisme. jaitu apabila modal imperialis sudah habis mentahan dan permilikan tanah kaum tuantanah mentahan dibagi kembali kepada rakjat. Jang terang, mentahan ketjilpun bisa mengerti, jang terang ialah mentahan dengan modal imperialis tidak mungkin kita membangun Sosialisme. Djangkalan Sosialisme, mentahan nasionalpun tidak akan mungkin ! Oleh mentahan itu, prinsip membangun ekonomi tanpa modal mentahan opoli asing, sudah mendjadi prinsip jang tak mentahan ditawar-tawar lagi bagi kita. Adapun sikap R.I. mentahan adap A.S., hal inipun sudah diketahuhi umum. mentahan perintah A.S. sendiri sangat tahu akan sikap kita mentahan. Segala sesuatunja tidak semata-mata tergantung mentahan R.I. Malahan, dalam keadaan sekarang, soal² mentahan lebih banjak tergantung pada sikap A.S. Apakah mentahan mereka akan menghentikan sokongan mereka termentahan ap „Malaysia“ dan bersahabat kembali dengan mentahan onesia, ataukah sebaliknja tetap menjokong mentahan „Malaysia“ dus memusuhi R.I. — ini adalah mentahan peran jang terpenting dewasa ini dalam relasi R.I. mentahan A.S. Baiklah pemerintah A.S. mempertimbangkan mentahan hal ini, karena achirnja pada kita ada hak mentahan — sebagai Republik jang berdaulat — untuk mentahan nasionalisasi, bahkan mengkonfiskasi modal asing mentahan apun jang memusuhi Republik Indonesia.

Singapura :

mentahan Lemahnja projek „Malaysia“ sudah kentara sementahan permulaannja. Ini sudah ratusan kali kukatamentahan ! Seperti seluruh dunia tahu, Brunai jang mentahan ni tempat pertama petjahnja revolusi Kalimantan mentahan na dibawah pimpinan Mahmud Azahari itu, mentahan bolak „Malaysia“ dan tidak pernah tergabungmentahan m „Malaysia“. Sekalipun diiklankan setjaramentahan an oleh pers imperialis seakan² ekonomi mentahan „Malaysia“ itu „makmur“, tapi aksi² kaum buruhmentahan na jang melawan kemerosotan hidup tidak bisa mentahan mbunjikan lagi. Sementara itu, sedang R.I. mentahan t pudjian dari mana² karena politiknja jang di mentahan Bhinneka Tunggal Ika sehingga Rakjat Indomentahan merupakan Rakjat jang rukun, di „Malaysia“ mentahan -menerus timbul kerusuhan² rasialis. Semua ini mentahan buktikan bahwa projek „Malaysia“ memangmentahan i projek jang dipaksakan. „Malaysia“ diadakanmentahan a lain untuk „overvote“, mengalah-stemkan,mentahan rvote“ suku Tionghoa. Pernah saja bersendamentahan a bahwa pertentangan Kualalumpur — Singa-mentahan lebih tadjam dari pada pertentangan Kuala-mentahan our — Djakarta“. Tentu ini hanja senda-mentahan u belaka, tetapi apapun alasannja, sudah mentahan i kenyataan bahwa Singapura memisahkan diri

dari „Malaysia“. Ja, „Malaysia“ mulai rontok dari dalam ! Rontok berantakan nantinja sama sekali ! Tidak ada kekuatan apapun didunia ini jang akan bisa mempertahankan kelangsungan hidup „Malaysia“ ! Tidak ada kekuatan, tidak Tengku, tidak Inggeris, tidak Amerika, tidak seribu dewa dari kajangan ! Peristiwa ini sekaligus mendemonstrasikan kegagalan total daripada politik kolonial Inggeris di mana². Sesudah gagal dengan West Indies Federation, gagal dengan Central Federation of Africa, gagal dengan South Arabian Federation, Inggeris kini gagal pula dengan „Federation of Malaysia“ !

Saudara-saudaraku setanah-tumpah-darah,

Kawan-kawanku serevolusi,

Perdjoangan kita selamanja mempunjai aspek nasional dan aspek internasional. Kedua-dua aspek ini tak terpisah-pisahkan satu sama lain. Pada perajaan Dwi-Dasawarsa Republik inipun kita perlu menelaah situasi internasional dalam mana kita sekarang berada.

20 tahun setelah berachirnja Perang Dunia II dan 20 tahun setelah didirikannja P.B.B., perdamaian dan keamanan bangsa² tetaplah tinggal tjita², tinggal harapan, sedangkan kenjataannja, banjak bangsa² masih merana dalam penderitaan jang berlarut-larut, akibat „peradaban“ imperialisme. Kaum imperialis paling suka menjebut dirinja „beradab“; mereka djuga paling suka menganggap kita² ini „biadab“, sehingga mereka harus datang dengan pasukan², dengan armada²nja, dengan pangkalan² perangnja, untuk „mengadjarkan peradaban“ kepada kita, kata mereka itu. Dalam „mengadjarkan peradaban“ itu mereka tjukup rojal, tidak sajang harta tidak sajang benda, dan djika kita² ini dianggap „mbandel“, maka dibomnjalah kita : dibomnja Maluku, dibomnja Kambodja, dibomnja Laos, dibomnja Kuba. Pada saat ini rupanja bangsa jang paling „mbandel“ itu bangsa Vietnam, sehingga bangsa ini setiap hari, setiap djam, setiap detik dihudjani bom oleh pembawa-pembawa „missi sutji“ dari Washington..... Kalau „missi sutji“ itu gagal total, sudah tentu jang salah, katanja, ja kaum „biadab“ ini !

Mereka jang datang dari djarak sedjauh separo bola-bumi, datang dari djarak 20.000 km, mereka itu namanja „pembela perdamaian“, sedang Rakjat Vietnam jang tinggal dinegerinja sendiri, mengurus urusannja sendiri dan mengatur tata-hidupnja sendiri, Rakjat Vietnam ini dinamakan „agresor“. Salah-satu, salah satu harus gila, Saudara² Vietnam atau Amerika Serikat. Kedua²nja gila tidak mungkin, kedua²nja waraspun tidak mungkin ! Saudara² bisa menjimpulkan sendiri mana jang waras dan mana jang gila !

Achirnja „alasan“ A.S. mengapa melakukan „escalation“, jaitu penaikan, penambahan, penghebatan atas peperangannja di Indotjina adalah, katanja, „untuk mentjegah Vietnam mendjadi negeri Komunis“. Saja tidak pernah mendengar kawanku Paman Ho, Ho Chi Minh jang sering saja bitjara dengan beliau, saja tidak pernah mendengar beliau

itu berkeberatan A.S. merupakan negeri kapitalis, djika Rakjat A.S. memang menghendaki demikian; kenapa A.S. berkeberatan Vietnam „mendjadi negeri Komunis”, djika Rakjat Vietnam menghendaki demikian? Hak menentukan nasib sendiri berarti pula hak menentukan matjam pemerintahan jang dikehendaki oleh sesuatu Rakjat dinegerinja sendiri. Ini bahkan tertjantum dalam „Declaration of Independence” Amerika Serikat sendiri! Ataupun dokumen besar ini telah dilemparkan sendiri oleh bangsa Amerika?

Kalau agresi A.S. terhadap Vietnam itu kita biarkan, maka dia akan merupakan bahaya besar bagi seluruh tata-hidup internasional kita. Sekarang agresi itu terdjadi di Vietnam, besok dia mungkin terdjadi di bumi lain! Dia malahan sudah terdjadi djuga di Dominika. Maka dari itu, demi keselamatan masing² dan demi keselamatan kolektif kita, kita bangsa² jang tjinta-merdeka dan tjinta-damai harus melawan agresi A.S. itu, dan harus aktif memberikan sokongan kita kepada saudara² di Vietnam itu.

Kepada pemerintah A.S. ingin saja nasehatkan — kuharap benar² mereka masih bisa mendengar nasehat! — supaja mengakui kesalahannya dan segera menarik diri samasekali dari Vietnam dan dari seluruh Indotjina. Pertjuma mereka menuduh Republik Demokrasi Vietnam „tidak sudi berunding”, karena apabila A.S. tidak menarik diri sama sekali dari Vietnam, setiap orang melihat djustru A.S.-lah jang tidak sudi penyelesaian setjara damai. Baik disadari oleh A.S., bahwa satu²nja alternatif baginja adalah keluar sama sekali dari seluruh Asia Tenggara! Djika mereka emoh menarik diri, mereka bisa kehilangan segala-galanya, segala-galanya! Maka, hai Amerika! Hai, Ingeris! **Zaman ini bukan Zamannya imperialisme lagi. Zaman ini adalah zamannya anti-imperialisme. Zaman ini adalah zaman hantjur leburnja imperialisme!**

Sebagai seorang jang telah makan garam per-djoangan, aku tahu bahwa tak pernah imperialisme itu menjerah dengan sukarela. Mereka hanja menjerah, djika mereka dipaksa, jaitu dipaksa dengan kekuatan jang maha dahsjat, dengan **machtsvorming dan machtsaanwending, nasional dan internasional.**

Disinilah letak pentingnja Conefo, karena melalui Conefo itu kita akan menggalang „samenbundeling van alle internationale revolutionaire krachten”, jang kusebut djuga „Nasakom internasional”, — gabungan daripada negara² Nasionalis, negara² Agama dan negara² Komunis dalam skala dunia, untuk melabrak babak belur-hantjur-lebur nekolim, untuk membangun dunia kembali, membangun dunia baru — dunia tanpa imperialisme dan tanpa exploitasi.

Situasi internasional dewasa ini adalah baik dan menguntungkan kita. Keluarnya Republik Indonesia dari Perserikatan Bangsa² menambah baiknja situasi internasional itu. Sebab, walaupun ada diantara sahabat² kita diluar negeri jang tidak menjetudjui Republik Indonesia keluar dari P.B.B., atau jang mengharap Republik Indonesia masuk kembali

P.B.B., namun keluarnya Republik Indonesia dari P.B.B. itu bisa mereka gunakan untuk memperjelas posisi mereka dalam menghadapi nekolim. Jang terang P.B.B. sekarang tidak bisa main seanebi sendiri, karena P.B.B. harus memperhitungkan pendirian dan sikap negara² dan pemerintah² jang berhidup desnoods tanpa P.B.B. Sikap Republik Indonesia itu adalah kritik jang paling tajam jang diberikan kealamat P.B.B., dan biarlah P.B.B. buka matanja, kalau dia mau!

Dalam rangka pembinaan setia kawan Afrika, baru² ini saja telah mengutus Wakil Perdana Menteri I/Menteri Luar Negeri Subandrio disamping Menteri Penerangan dan dua orang Menteri Negara untuk mengundjungi 4 negara Timur Tengah dan negara Afrika. Missi itu telah menumbuhkan sajian — pengertian jang mendalam diantara kita — negara² jang dikundjungi, dan saja mengutip terima kasih kepada pemerintah² jang bersangkutan atas sambutan mereka terhadap missi jang disebut „Safari Berdikari” itu. Republik Indonesia ingin menegaskan, bahwa Berdikari tidak berarti menguraikan melainkan memperluas kerdjasama internasional terutama diantara semua negara jang baru merdeka. Jang ditolak oleh Berdikari adalah **ketergantungan** kepada imperialisme, bukan kerdjasama jang solid deradjat dan saling menguntungkan.

Karena nekolim itu biasanja mendirikan pangkalan-pangkalan militer diwilajah² orang lain, sedangkan pangkalan² militer asing itu merupakan bahaya utam bagi perdamaian dunia, maka sedjumlah organ massa di Indonesia telah mengambil prakarsa membentuk suatu komite jang dalam tahun ini djuga akan menyelenggarakan di Indonesia satu Konferensi Internasional Anti Pangkalan² Militer Asing. Pemerintah Indonesia menjambut inisiatif itu, karena konferensi itu sesuai dengan Semangat Bandung.

Makin hari makin tegas perlawanan Rakjat² sedunia terhadap neo-kolonialisme. Ada dua faktor jang menyebabkan neo-kolonialisme itu lebih berbahaya daripada kolonialisme model lama. Pertama, kapitalis² maupun praktek²nja belum tjukup dikendalikan oleh Rakjat, artinja, Rakjat belum tjukup mempunyai pengalaman dengan sistim baru itu. Kedua, kapitalis² pendjadjah jang sesungguhnya, seringkali tidak kelihatan, sebab, neo-kolonialisme itu adalah pendjadjahan, jang orang katakan pendjadjahan by proxy, pendjadjahan by remote control, pendjadjahan „dari djauh”.

Selamatanja saja bertolak dari pendirian, bahwa imperialisme-lah jang memerlukan kita, **bukan** kita memerlukan kaum imperialis! Inilah keterantaraanja, kenapa sesudah kaum imperialis terlalu bertjingtjong dan bertingkah, aku serukan „Go to the aid of your friends with your aid!”. Sesudah dipersetan, mereka serukan jang datang mendekat-dekat lagi dan menawarkan „bantuan” mereka. Tetapi saja tahu bahwa tidak ada „bantuan” nekolim jang tjuma². Oleh karena itu, soal²nja tergantung dari ada-tidaknya ikatan langsung maupun tak-langsung pada „bantuan” yang ditawarkan.

Diatas segala-galanya kaum sana harus tahu mengamati kedaulatan Republik Indonesia dan mengantikan sama sekali setiap kegiatan subversif di onesia !

Republik Indonesia akan meneruskan sokongan-jang aktif, kepada perjoangan kemerdekaan Rakjat² Kalimantan Utara, Angola, Mozambik, Guinea (Bissau), Timor „Portugis”, Somali „Peran”, Jaman Selatan, Oman, Azania (Afrika Selatan), Namibia (Afrika Barat Daja), Betswana (Bechuana-land), Lseotho (Basutoland), Swatini (Swaziland), dan lain². Sekalipun seluruh wilayah Republik Indonesia telah pulih dipangkuan kemerdekaan, dan sekalipun nanti sisa² imperialisme telah kita kikis sekali dari Indonesia, namun Republik Indonesia menganggap perjoangannya belum selesai seadanya di dunia ini masih ada satu wilayah jang belum bebas, sekalipun hanya sedjengkal besar ukurannya ! ! Berturut-turut selalu aku katakan, Rakjat Indonesia berjoangan mengganjang nekolim as a matter of principle.

Saudara-saudara sekalian,

Didalam negeri situasi djuga baik dan mengungungkan kita kaum revolusioner. Hari ini genap tahun usia Manipol. Berkat indoktrinasi, latihan revolutionnaire gymnastiek — dan pengorganisasian jang terus-menerus dan sambung-bersambung, Rakjat Indonesia kini memiliki kesadaran politik jang patut dibanggakan. Rakjat jang demikian ini, djika diorganisir lebih teratur, dilatih lebih militan, diindoktrinir lebih bersasaran, dipimpin dengan metode jang lebih tepat, pastilah akan mempunjai kekuatan jang tidak terbatas untuk melaksanakan Amanat berkeadilan deritaannya sendiri, jaitu berofensif dengan senjata „Pantja Azimat”.

Bedjak dimaklukkannya Deklarasi Bogor maka persatuan nasional semakin kokoh, terutama karena jangkungan anasir² Manipolis-munafik dikerdjakan para lebih gentar. Tetapi djangan kita puas dengan kadar persatuan jang telah kita tjapai. Kita harus membikin persatuan nasional revolusioner poros Nasakom itu mendjadi kekuatan jang bertentangan menentukan dalam kehidupan politik kita sebagai bangsa-negara.

Untuk ini Front Nasional bisa memainkan peranan jang penting. Aku bergembira bahwa Front Nasional jang baru² ini aku „damprat”, karena pemimpin²nya berpusat maupun didaerah-daerah lebih merumuskan amtenar² daripada mendjadi pemimpin² Rakjat sekarang melakukan langkah² baru jang mereka katakan „revolusi dalam tjara bekerdja” jaitu „t u r u m u l a i” memulai menempuh tjara memimpin jang tepat „dari massa kembali ke-massa”, dan membangkitkan swadaja Rakjat. Tepat sembojan Panitia Nasional dan Front Nasional untuk Dwi-Dasawarsa kalamasi ini, jaitu „Bersatu dan berkompetisi melaksanakan Pantja Azimat Revolusi Indonesia” ! Karena Manipol/Usdek, Pantja Sila dan Nasakom telah semakin meresap dan bagi kaum reaksioner

semakin sulit untuk melawannya dengan terang-terangan, maka gejala jang menjolok mata akhir² ini ialah bertambah-tambahnya kaum munafik, kaum gadungan, kaum manis-dimulut-djahil-dihati. Semua mengaku setudju Manipol, semua mengaku setudju Pantja Sila, semua mengaku setudju Nasakom. Dalam keadaan begini, setialah hai, kawan-kawanku, kepada jang kukatakan bahwa ukuran terutama bagi kaum revolusioner adalah **satunja kata dengan perbuatan**. Ukurlah pemimpin-pemimpinmu, ukurlah orang², ukurlah siapa sadja terutama dari perbuatannya ! Kalau perbuatannya njeleweng, tendang mereka itu dari kalangan kita !

Djuga alat² negara, ormas², partai² politik dan badan² lain harus kita ukur dari satunja kata dengan perbuatan. Khusus mengenai partai² politik aku ingin berseru supaya mereka berlomba-lomba memperhebat peranannya dalam ofensif Manipolis sekarang ini. Partai² politik revolusioner adalah alat jang sangat efektif untuk mengikut sertakan dan mengerahkan massa Rakiat untuk ambil-bagian dalam revolusi. Ini tak boleh diragukan, karena meragukan ini berarti meragukan kebenarannya Manipol. Tetapi kutekankan sekali lagi : partai² politik jang revolusioner ! Jang tidak revolusioner, apalagi jang anti-revolusioner tak akan punya hakhidup lagi di Indonesia. Tindakan pembekuan Partai Murba membuktikan bahwa Pemerintah tidak akan ragu² mengambil tindakan, djuga terhadap partai² politik, djika menjeleweng, djika memetjah-belah persatuan.

Kuserukan kepada partai² politik jang Manipolis, agar mereka membersihkan diri dan terus membersihkan diri dari elemen² munafik, elemen² „B.P.S.”, elemen² soska, elemen² Nasakom-phobi, elemen² plintat-plintut, elemen² gadungan, dan sebangsanya, dan agar mereka melangsunakan kompetisi Manipolis dalam mengabdikan Ampera dan berofensif dengan : „Pantja Azimat”.

Kapada alat² negara kuserukan supaya mereka benar² meniatukan diri dengan Rakjat. Pengabdian kepada Rakiat itu tidak pernah tjukup, apalagi berkelebihan. Djangan seperti amtenar² kolonial jang melihat Rakiat itu sebagai momok. Rakiat ada'ah asalmu, Rakjat adalah kekuatanmu, Rakiat adalah p e p u n d e n m u, Rakjat adalah sumbermu !

Kepada Rakjat seluruhnya kuserukan agar menempuh segala daja-upaja untuk memperkokoh persatuan nasional revolusioner. Basmilah setiap prinsipalisme jang menolak kerdjasma dan persatuan, hanya dikarenakan masalah² zogenaamd prinsip, masalah² ideologi, masalah² zogenaamd agama, dan sebagainya. Bulan Maret jang lalu M.P.R.S. telah memutuskan pelarangan propaganda anti-Nasionalisme, pelarangan propaganda anti-Agama dan pelarangan propaganda anti-Komunisme. Keputusan ini baik sekali dan membuktikan bahwa badan legislatif tertinggi dinegeri kita itu tahu akan tanggung-djawabnya. Tjamkanlah keputusan M.P.R.S. ini dan laksanakanlah ia dengan toleransi jang sebesar-besarnya !

Belakangan ini ramai dibicarakan orang tentang gagasan yang kulantjarkan tentang Angkatan ke-5. Seperti tadi kukatakan, tiap² kali aku mengetengahkan gagasan baru, selalu sadsja ada berbagai reaksi, jang sajangnja kadang² dipengaruhi oleh text-books oldefo. Malahan, karena gagasanku itu aku dituduh „main djipak”. Tetapi bagaimanapun aku sambut dengan rasa-sukur sokongan² jang diberikan kepada gagasanku itu. Kita harus selalu bertolak dari kenyataan. Dan kenyataannya adalah, bahwa kaum nekolim menjarahkan mata-pedang dan montjong-meriamnja kepada kita. Kenyataannya adalah, bahwa pembelaan Negara menuntut dari kita tenaga jang sebanjakkbanjakknja. Sedang menurut Undang-undang Dasar 1945 kita, fasal 30, „tiap² warganegara berhak dan wadajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara”. Setelah mempertimbangkan soalnya setjara lebih matang lagi, maka saja selaku Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata akan mengambil keputusan mengenai hal ini.

Aku bangga sekali bahwa Angkatan Bersendjata Republik Indonesia kita jang modern sekarang dalam keadaan siap-siaga dan mampu memukul musuh dari manapun datangnya. Angkatan Bersendjata Republik Indonesia harus ambil-bagian jang penting dalam setiap perdoangan melawan imperialisme dan feodalisme. Tahun 1946 telah kukatakan: Angkatan Bersendjata Republik Indonesia kita itu akan merupakan kekuatan jang tak terkalahkan, apabila mereka bersatu dengan Rakyat laksana ikan dan air. Ingat-air bisa ada tanpa ikan, tetapi ikan tak bisa hidup tanpa air. Berintegrasilah dengan Rakyat, karena Angkatan Bersendjata Republik Indonesia adalah Angkatan Bersendjata jang Revolusioner. Pertahanan Revolusi adalah pertahanan Rakyat. Angkatan Bersendjata Republik Indonesia harus menjadi inti daripada pertahanan jang mulia itu, tetapi dengan pulau sebanjak pulau kita, dengan pantai sebandan? pantai kita, dengan angkasa selebar angkasa kita, kita tak bisa menegakkan kedaulatan Negara kita tanpa Rakyat, kalau perlu djuga dipersendjatai-Rakyat, kaum buruh dan kaum-tani dan kaum² lainnya, jang tetap dalam proses produksi tetapi jang kalau perlu sementara memanggul senapan.

Pendekkata, Saudara² sekalian, kita punja keprihatinan harus kita pusatkan kepada pelaksanaan daripada Trisakti Tavip, jang kebenarannya bahkan telah diakui dan disetujui oleh Musjawarah Menteri² Asia Afrika ke-II di Djakarta tahun jang lalu. Harus diingat, bahwa Trisakti itu harus dipenuhi ketigatiganya, tidak bisa dipretel-preteli. Tidak ada kedaulatan dalam politik dan kepribadian dalam kebudayaan, bila tidak berdikari dalam ekonomi, dan sebaliknya! Seluruh minat kita, seluruh djerih-pajah kita harus kita abdikan kepada pelaksanaan seluruh Trisakti, jang benar-benarnya inti daripada perdoangan kita!

Ja, Berdaulat dalam politik! Apa jang lebih luhur daripada ini, Saudara²? Lebih setengah abad lamanya bangsa Indonesia berdoang, membanting tulang dan menjutjurkan peluh, untuk kedaulatan politik

itu. Sekarang kedaulatan itu sudah ditangan kita. Kita tidak bisa didikte oleh siapapun lagi, kita tak menggantungkan diri kepada siapa² lagi, kita tak mengemis-ngemis! Kedaulatan politik ini harus kita tundjang bersama-sama, harus kita tegakkan beramai-ramai. Nation-building dan character-building harus diteruskan sehebat-hebatnja, demi memperkuat kedaulatan politik itu. Kerukunan nasional sekarang ini — kerukunan antara berbagai agama dan berbagai sukubangsa, termasuk suku² keturunan asing — kerukunan nasional jang bebas samasekali dari diskriminasi atau rasialisme matjam apapun, harus kita bina dengan ketjintaan seperti kita memelihara kesehatan tubuh kita sendiri. Demi kedaulatan politik itu pula, maka perkembangan dalam pemerintahan dalam-negeri, jaitu seperti dikehendaki D.P.R.-G.R. — ditjabutnja larangan berpartai bagi Kepala Daerah dan anggota² B.P.H., dipisahkannya jabatan Kepala Daerah dari Ketua D.P.R.-G.R. dan Na Komisari pimpinan D.P.R.-G.R., harus disusul dengan pembentukan Daswati III untuk seluruh Indonesia.

Berdikari dalam ekonomi! Apa jang lebih kober daripada ini, Saudara²? Seperti kukatakan di depan M.P.R.S. tempohari, kita harus bersandar pada daya dan tenaga jang memang sudah ditangan kita dan menggunakannya se-maximal-maximalnja. Pepata lama „ajam mati dalam lumbung” harus kita achir sekali dan buat selama-lamanja. Kita memiliki segalanya sjarat jang diperlukan untuk memetjahkan masa sandang-pangan kita. Barangsiapa merintang perdoangan masalah ini, dia harus dihadapkan kedepan mahkamah Rakyat dan sedjarah. Alam kita kaja-rakyat kita radjin, tetapi selama ini hasil keringat dan dimakan oleh tuan-tuan-tanah, tengkulak-tengkulak lintah-lintah darat, tukang-tukang idjon dan setan setan desa lainnya.

Sudah tjukup usahaku memberi kesempatan kepada kaum jang ragu-ragu dalam revolusi, untuk merobah diri; aku sudah sangat sabar, sudah kutundjukkan kesabaran seorang bapak, tapi kesabaranku ada batasnja, apa lagi kesabaran Rakyat! Sudah tjukup usahaku memberi kesempatan bagi pelaksanaan landreform; batas waktunja malahan sudah kutundjukkan dan kalau perlu aku bersedia memperpanjang dengan 1 tahun lagi; aku sudah sangat sabar, sudah kutundjukkan kesabaran seorang bapak, tapi kesabaranku ada batasnja, apalagi kesabaran Rakyat! Sudah tjukup usahaku memberi kesempatan Dewan-dewan Perusahaan supaya mereka dia'an, tapi dibanjak tempat Dewan-dewan itu mati matiet sadsja; aku sudah sangat sabar, sudah kutundjukkan kesabaran seorang bapak, tapi kesabaranku ada batasnja, apalagi kesabaran Rakyat! Hanya dengan mengatasi kematjetan-kematjetan inilah kita bisa mentrapkan azas Berdikari dalam ekonomi.

Berkepribadian dalam kebudayaan! Apa jang lebih indah daripada ini, Saudara-saudara? Sudah sadsja bumi dan air dan udara kita kaja raja, djuga kebudayaan kita kaja-raja. Kesusastraan kita, seni-rakyat kita, senitari kita, musik kita, semuanya kaja-raja. Djuga untuk membangun kebudayaan baru Indonesia

ta memiliki segala sjarat jang diperlukan. Kebudayaan baru itu harus berkepribadian nasional jang at dan harus tegas-tegas mengabdikan kepada Rakjat. Dengan menapis jang lama, kita harus mentjiptakan jang baru. Sikap kita terhadap kebudayaan lama mau- ntu kebudayaan asing adalah sikapnja revolusi nasional-demokratis pula: dari kebudayaan lama kita kiris feodalismenja, dari kebudayaan asing kita punahkan imperialismenja. Maka itu tepat sekali film-film imperialis Inggeris dan A.S. di- dikot, djuga tepat sekali pemberantasan „musik” atle, literatur pitjisan, dansa-dansi gila-gilaan, n sebagainya. Pada pandji kebudayaan nasional ta harus kita tuliskan dengan tinta-emas K-nja dek kita! Kebudayaan kita haruslah kebudayaan ng revolusioner, jang seperti kukatakan di la tempohari harus mendjadi „duta masa dan ta massa”. Kita bukan hanja „trahing kusumo, mbesing madu”, tetapi kita djuga „trahing buruh- ni-lan-pradjurit, rembesing revolusi”!

Saudara-saudara sekalian, Inilah Trisakti Tavip, sebagian dari Pantja Rimat, Pantja Azimat sebagai pengedjawantahan uruh djiwa nasional kita, konsepsi nasional kita, ng terbentuk disepanjang sedjarah 40 tahun manja.

Saja sadar sesadar-sadarnja bahwa Saudara² harus ngahadapi kesulitan², ngahadapi kenaikan harga² butuhan sehari-hari. Saja ikut prihatin dengan udara, dan Insja Allah kenaikan harga dapat di- tasi. Sebaliknya semua kesulitan ini ialah dapat di- ggap sebagai satu tebusan dari apa jang sudah tjapai dalam Revolusi Indonesia. Bandingkanlah ulitan jang kita hadapi djika kita tidak ber- mbeg Parama Arta dalam melaksanakan Revolusi. gaimana djika kita ber-revolusi tanpa djiwa, hingga volusi kita dianggap mendjadi „Revolusi op drift”, u revolusi kita mendjadi alat Nekolim?

Tanpa ber-Ambeg Parama Arta dalam memper- mankan persatuan dan kesatuan, apakah Indonesia ak sudah terpetjah mendjadi puluhan negara, uai dengan politik Balkanisasi Nekolim? Tanpa kora, jang kita Ambeg Parama Arta-kan apakah onesia dapat mengembalikan Irian Barat dalam uasaan Ibu Pertiwi? Tanpa membangun Angkatan rsendjata kita jang kita Ambeg Parama Arta-kan, apakah kita dapat ngahadapi pemberontakan subversi P.R.R.I. — Permesta? Tanpa me- uasai perusahaan² asing, apakah Indonesia tidak n tetap tinggal mendjadi negara djadjahan dibi- ng ekonomi? Tanpa melaksanakan politik Dwikora, u penggantian „Malaysia”, apakah Indonesia ak tetap dikemudikan oleh ekonomi Nekolim jang pusat di Singapura dan Hongkong? Tanpa politik mbeg Parama Arta, apakah kita dapat mengadakan klamasi Bebas Buta Huruf segenap Rakjat Indo- ia pada tanggal 31 Desember 1964, jang diikuti ng komando Pelaksanaan kewadajiban beladjar? Memang kita ber-revolusi, berdjoang dengan djiwa g tertentu, dengan tudjuan dan strategi jang ter-

tentu. Landasan kebangsaan dan kenegaraan dari abad ke-XX, dari Dunia Baru, kita Ambeg Parama Arta-kan; dan kita bersedia untuk memberikan pengorbanan apapun untuk mentjapai landasan mut- lak bagi kedjajaan Bangsa dan Negara Indonesia. Segala pengorbanan dapat dipikul Bangsa Indonesia berkat karunia Tuhan. Kita dapat ngahadapi kon- tra-revolusi dan pemberontakan P.R.R.I. — Per- mesta tanpa collapse, tanpa runtuh, dan hasilnja gilang-gemilang. Kita melaksanakan Trikora tanpa collapse, tanpa runtuh, dan hasilnjapun gilang- gemilang. Kita melaksanakan Dwikora tanpa collapse, tanpa runtuh, dengan hasilnja..... sekarang „Malaysia” sudah lebih daripada 50% hantjur-lebur berantakan samasekali!

Hai tuan² Nekolim, tentu kami harus memberikan segala pengorbanan, mengalami berbagai kesulitan dalam penghidupan sehari-hari, tetapi perhatikan!: kami tidak collapse, kami tidak kelaparan, kami tidak runtuh! Ramalanmu tidak benar!

Sebaliknya kamu, Nekolim, kamu makin hari ma- kin menderita keruntuhan, kamu makin hari makin mendekati collapse.

Bagi kita perdjoangan anti-Nekolim **hanja mengun- tungkan** Revolusi Indonesia, menguntungkan Djiwa Indonesia, menguntungkan pembangunan Indonesia, menguntungkan kemerdekaan Indonesia. Perdjoangan anti-Nekolim memberikan djiwa baru pada Indo- nesia, memberikan satu kesatuan jang kokoh, mem- berikan tekad jang membadja, memberikan kebeba- san untuk mengatur Rumah Tangga Nasional, „the freedom to be free”. Untuk ini kita **bersedia untuk membajarnja**, membajar uang beladjar, membajar uang bertumbuh membajar dengan pengorbanan dan keprihatian.

Sekarang kita sudah pada tingkatan Djiwa Ber- dikari, berkat perdjoangan tjara Ambeg Parama Arta. Sekali Revolusi kita meningkat pada Djiwa Berdikari, pertumbuhan selanjutnja tinggal soal pelaksanaan. Maka dari itu Saudara² sekalian, ada- kan Banting Stir pada seluruh Bangsa Indonesia agar Djiwa Berdikari mendjadi milikmu, agar Lima Azimat Revolusi mendjadi milikmu. Saudara² jang memperdjoangkan landasan² tersebut dengan segala pengorbanan, sekarang Djiwa Berdikari dan Lima Azimat harus mendjadi alatmu, mendjadi pusakamu dalam mengabdikan pada Revolusi. Ingat: Saudara² sudah memberikan Djiwa pada Revolusi, sehingga Saudara² harus tetap taat pada Djiwa Revolusi, tetap mempertahankan dan mempertumbuhkan Djiwa Re- volusi. Djiwa Revolusi Indonesia sudah dewasa, dan akan bertumbuh sebagai suatu „self-propelling growth”. Hai Bangsaku, Bangsa Indonesia, Bangsaku jang gagah berani dalam perdjoangan, pantang mun- dur dalam kesulitan, lemah-lembut dalam pergaulan!

Apa jang engkau tjapai dalam 20 tahun ini merupa- kan satu kebanggaan. Ini sebabnja, maka aku mem- beranikan diri untuk memberikan pertanggung- djawab pada semua kawan dan semua lawan, — pada kawan untuk bahan konsultasi, bagi lawan se-

bagai alat konfrontasi. Dan pertanggung-jawab pada Engkau Bangsa, Bangsa Indonesia, sebagai bukti bahwa Bung KARNO tidak lain tidak bukan hanjalah Penjambung Lidah Bangsa Indonesia, Bung Karno Penjambung Semangat Bangsa Indonesia, Bung Karno Penjambung Kekuatan Bangsa Indonesia. Insja Allah saja akan meneruskan Pimpinan Revolusi Indonesia dengan karunia Tuhan, dengan Doa Restu Bangsa Indonesia.

Sudah banjak jang kita tjapai dalam 20 tahun ini. Kita sudah melampaui tingkatan terpenting dalam Revolusi kita. Akan tetapi kita masih belum boleh beristirahat. Kita boleh merasa puas dengan apa jang sudah kita tjapai dimasa jang lampau, akan tetapi tetap waspadalah buat masa jang akan datang; kita masih harus Madju Terus, Madju Terus, Madju Terus, untuk mentjapai hasil dan kemenangan baru, kemenangan baru sebagai tambahan modal untuk memberikan pukulan baru, pukulan jang menentukan pada rintangan dan musuh-musuh Revolusi.

Kita merajakan 20 tahun Agustus agung ini, diwaktu kita sudah mempunjai Pantja Azimat. Pantja Azimat adalah pengedjawantahan daripada seluruh djiwa nasional kita, konsepsi nasional kita, jang terbentuk disepanjang sedjarah 40 tahun lamanja.

Azimat Nasakomlah jang lahir terlebih dulu, dalam tahun 1926, karena persatuan Nasakom itulah sesungguhnya sendjata kita jang paling ampuh, dulu untuk merebut, sekarang untuk mengkonsolidir kemerdekaan nasional. Azimat kedua adalah azimat Pantja Sila, jang lahir pada bulan Djuni 1945 diwaktu Ibu Sedjarah sudah mengandung tua, dan diwaktu baji kemerdekaan sudah hampir lahir. Ketika itu opgave terpenting adalah menemukan suatu d a s a r N e g a r a, dan maka itulah Lahir Pantja Sila. Azimat ketiga adalah azimat Manipol/Usdek, jang baru lahir setelah kita 14 tahun lamanja mengalami masa Republik merdeka, azimat jang berupa Program Umum Revolusi, jang inti-sarinja tidak boleh dimodulir atau diamendir. Azimat keempat adalah Azimat Trisakti Tavip, jang baru lahir tahun jang lalu, setelah kita mengalami bermacam-macam pengalaman dengan kaum imperialis, dengan P.B.B., dan lain². Azimat jang kelima adalah azimat Berdikari, jang terutama tahun ini kutjanangkan dan serta-merta mendapat persetujuan dari M.P.R.S., dari seluruh pers Manipolis, dari segenap Rakjat progresif. Berdikari bukan hanja azas untuk tahun ini — jang sebagian Rakjat sudah menamakannja „Tahun Berdikari” — tetapi azas untuk masa jang pandjang, selama kita masih mengkonsolidir kemerdekaan nasional kita dan selama kita masih berhadap-hadapan dengan imperialisme. Mungkin seluruh dasawarsa, atau seluruh dwi-dasawarsa, atau seluruh tri-dasawarsa jang ada dihadapan kita ini akan merupakan „Dasawarsa Berdikari”!

Kita harus meneruskan, bahkan meningkatkan lebih landjut ofensif Manipolis, ofensif revolusioner kita. Berat dan banjak masih tugas² jang ada didepan kita. Pandjang dan berliku-liku masih djalan jang

harus kita lalui. Tetapi a d a jang meringankan kita jaitu kenyataan bahwa kita kini memiliki P a n t j a A z i m a t itu!

Achir² ini dilakukan kampanje jang besar-besarnya bahwa „hari² Sukarno sudah bisa dihitung”. Malah satu surat kabar Belanda menamakan masa sekarang ini „pro-post-Soekarno-periode”. Untuk kampanje kaum imperialis kerahkan pers, radio, TV, sampai kepada dukun² klenikpun, Saudara-saudara!

Saudara²! Sukarno hanja seorang manusia. Seperti juga Saudara², maka umur saja ada ditangan Tuhan. Tetapi selama hayat dikandung badanku, selama ini pula Insja Allah aku tetap akan mengabdikan segalanya jang ada padaku kepada urusan Tanah-air, kepada urusan Rakjat, kepada urusan Revolusi. Insja Allah, Sukarno akan selalu ditengah² Rakjat dan bersama² Rakjat, ditengah² Rakjat djelata, Rakjat ketjil, Rakjat jang mendjadi Pembikin daripada Sedjarah!

Salah-seorang penjair kita menjatakan „ingin hidup seribu tahun lagi”.

Akupun ingin hidup seribu tahun lagi. Tetapi hal ini tentu tidak mungkin. Tidak ada satu manusia pun jang mentjapai umur seribu tahun. Tetapi a m e n d o ' a, ja Allah, ja Rabbi, moga-moga gagasan² dan ajaran²ku, jang kini tersimpul dalam **lima** Azimat dan gagasan² dan ajaran²ku itu akan hidup seribu tahun lagi!

Sebab ia adalah „Rukun Lima” daripada Kemerdekaan kita. Karena itu, madjulah terus dengan Lima Azimat itu laksana api-abadi dalam kalbumu!

Dengan Lima Azimat itu kita pasti menang.

Kekalahan kita tidak mungkin lagi, sebagaimana juga kemenangan imperialis tidak mungkin lagi. Sebaliknya!

Kekalahan imperialis tidak bisa ditjegah, seperti kemenangan kita juga tidak bisa ditjegah!

Kemenangan adalah hasil perdjoangan, hasil perjuangan! Karena itu harus menumplekkan kekuatan kita, kita punja bakat, kita punja kepandaian, kita punja segala-galanja untuk merebut **kemenangan terachir** jang sudah tampak dipelupuk mata!

Kita harus bersatu, bersatu, bersatu, seperti satu nja lima djari dalam kepalan!

Kita harus teguh, harus teguh, harus teguh, seperti teguhnja batu karang dilautan jang bergelora!

Kita harus berani, berani, berani, seperti berani banteng dan elang radjawali!

Ja! Dengan sendjata Pantja Azimat, madjulah terus mendjalankan ofensif Manipolis disegala lapangan!

Madju terus! Pantang mundur!

Ever onward, never retreat!

Sekali merdeka, tetap merdeka!

Sekali Berdikari, tetap Berdikari!

Insja Allah, kita pasti menang!

Sebab Tuhan beserta kita!

Terimakasih.

Adjaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno

Mentjapai

Indonesia Merdeka

HANJA RAKJAT JANG MAU MERDEKA BISA MERDEKA

T I L A K

Selatan dari Bandung adalah satu tempat-pegunungan jang bernama Pangalengan. Ditempat itu saja, sekembali saja dari sajumlah tournee tempohari ke Djawa Tengah jang membangkitkan Rakjat sediumlah 89.000 orang, ber-takansi beberapa hari melepaskan kelelahan badan. Didalam vakansi itu saja menulis ini risalah, ini vlugschrift.

Isinja buat kaum ahli-politik tidak baru, tapi buat orang jang baru mendjedjakkakan kaki digelanggang per-djoangan ada faedahnja djuga.

Untuk mendjaga djangan sampai risalah ini mendjadi terlalu tebal. — dus djuga djangan sampai terlalu mahal harganja-, maka hanja garis² besar sahadjja jang bisa saja guratkan. Mitsalnja fatsal "Diseberang Djembatan-emas" kurang djelas. Tetapi Insja Allah akan saja bitjarakan nanti spesial didalam risalah lain, jang djuga akan bernama "Diseberang Djembatan-emas".

Moga-moga risalah ini banjak dibatja oleh Marhaen.

S U K A R N O

Maret 1933.

SEBAB-SEBABNJA INDONESIA TIDAK MERDEKA

Professor Veth pernah berkata, bahwa sebe-ranja Indonesia tidak pernah merdeka. Dari zaman purbakala sampai sekarang, dari zaman zaman tanun sampai sekarang,- dari zaman Hindu sampai sekarang, inaka menurut professor itu Indonesia senantuasaa mendjadi negeri djadjaan mula-mula djadjaan Hindu, kemudian djadjaan Belanda. Dengan persetujuan jang sepenuhnya-nuhnja, maka didalam salah satu bukunja ia menjajutkan sjairnja seorang penjair jang ber-namja :

Aan Java's strand verdrongen zich de volken;
Steeds daagden nieuwe meesters over't meer;
Zij volgden op elkaar, gelijk aan't zwerk

de wolken
De telg des lands alleen was nooit zijn heer".

Sjair mana berarti :

"Dipantainja tanah Djawa rakjat
berdesak-desakan;

Datang selalu tuan-tuannja setiap masa :

Mereka beruntun-runtun sebagai
runtunan awan;

Tapi anak-pribumi sendiri ta' pernah kuasa'.

Pendapat kita tentang pendirian ini? Pendapat
ia ialah, bhw professor jg pandai itu, jg memang
mendjadi salah satu "datuk"-nja penjelidikan ri-

wajat kita, ini kali salah raba. Ia lupa, bahwa ada-lah perbeuaan jang daian sekali antara hakekat-nja zaman Hindu aan hakekatnja zaman sekarang. Ia lupa, bahwa zaman Hindu itu tidak terutama sekali berarti suatu pengungkungan oleh kekua-saan Hindu, jani tuak terutama sekali berarti suatu machtsusurpatie dari pihak Hindu diatas pundaaknja tihak Indonesia. Ia lupa, bahwa dida-lam zaman Hindu itu Indonesia sebenarnja adalah merdeka terhadap pada Hindustan, sedang dida-lam zaman sekarang Indonesia adalah tidak mer-deka terhadap pada negeri Belanda.

Merdeka terhadap paa Hindustan? Toeh radja radja zaman purbakala itu mula-mula bangsa Hindu? Toeh kaum ningrat zaman purbakala itu, mula-mula bangsa Hindu? Toeh kekuasaan zaman purbakala itu ada ditangannja orang-orang bangsa Hindu? Toeh dus, Rakjat djelata zaman purbakala itu diperin-tah oleh orang-orang bangsa Hindu? Ja! Merdeka terhadap pada Hindustan, oleh karena kaum jang kuasa didalam zaman Hindu itu tidaklah terutama sekali kaum "usurpator", tidak terutama sekali kaum "perebut kekuasaan",- tidak terutama se-kali kaum pendjadjah. Mereka bukanlah kaum jang merebut keradjaan, tetapi mereka sendirilah jang mendirikan keradjaan di Indonesia! Mereka menjusun staat Indonesia, jang tahadinja tidak ada staat Indonesia. Mereka "menemukan" ma-sjarakat Indonesia tidak sebagai suatu masjarakat

jang sudah berupa "negeri", tetapi suatu masjarakat jang belum ketinggian susunan. Mereka mendirikan disini suatu keadaan, suatu cultuur, jang bukan suatu cultuur "dari atas", bukan suatu "imperialistische cultuur",- tetapi suatu cultuur jang hidup dan subur dengan masjarakat Indonesia. Merekapunja perhubungan dengan Hindustan bukanlah perhubungan kekuasaan, bukanlah perhubungan pemerintahan, bukan perhubungan macht tetapi ialah perhubungan peradaban, perhubungan cultuur. Radja-radja zaman purbakala itu hanja didalam permulaannja sahadja orang-orang bangsa Hindu,- radja-radja itu kemudian adalah orang-orang Hindu-Indonesia, dan kemudian lagi orang-orang Indonesia-Hindu, jang adat istiadatnja, tjara hidupnja, agamanja, cultuurnja, kebangsaannja, darahnja, rasnja berganda-ganda kali lebih Indonesia daripada Hindu, ja, achirnja samasekali Indonesia dan hanja "berbau" sahadja Hindu. Pendek-kata, didalam zaman purba kala itu negeri Indonesia bukanlah "koloni" dari negeri Hindu, bukan "kepunjaan" negeri-Hindu, bukan djadjahan negeri Hindu. Negeri Indonesia dizaman itu adalah merdeka terhadap pada negeri Hindu adanja!

Negeri Indonesia ketika itu merdeka,- tetapi penduduk Indonesia, Rakjat-djelata Indonesia, Marhaen Indonesia, adakau ia djuga merdeka? Marhaen Indonesia tidak pernah merdeka. Marhaen Indonesia, sebagai Rakjat Marhaen diseluruh dunia, sampai kini belum pernah merdeka! Marhaen Indonesia itu dizaman "Hindu", tatkala negeri Indonesia bernama merdeka dari Hindustan, adalah diperintah oleh radja-radjanja setjara feodalisme: Mereka hanjalah mendjadi perkakas sahadja dari radja-radja itu dengan segala bala-keningratannja, mereka tidak mempunjai hak menentukan sendiri putih hitam nasibnja, mereka senantiasa ditindas oleh "kaum atasan" daripada masjarakat Indonesia itu, sebagaimana kaum Marhaen dimana-mana negeri dunuka bumi dizaman feodalisme djuga menderita nasib tertindas dan terkungkung. Mereka haruslah hidup dengan selamanja ingat bahwa miliknya dan njawanja "nek awan duweke sang nata, nek wengi duweke dur-sila", ja'ni dengan selamanja ingat akan nasibnja perkakas, jang banjak kewadjabannja tetapi tiada hak-haknja sama sekali. O, Marhaen Indonesia, jang dulu tjelaka dalam zaman feodalismenja keradjaan dan keningratan bangsa sendiri, jang kini tjelaka dalam zaman modern kapitalisme dan imperialisme,- berdjoanglah habis-habisan mendatangkan nasib jang sedjati-djatinja merdeka!

Tetapi marilah kembali pada pokok pembitjaraan: Negeri Indonesia, berlainan dengan pendapat professor Veth, dulu adalah negeri jang merdeka. Negeri Indonesia itu kemudian hilang kemerdekaannja, kemudian mendjadi koloni, kemudian mendjadi bezitting, kemudian mendjadi negeri-djadjahan. Dan bukan negeri Indonesia sahadja! Seluruh dunia Azia kini,- ketjual satu dua bagian sahadja,- adalah tidak merdeka. Mesir

tidak merdeka, Hindustan tidak merdeka, India tidak merdeka, China tidak merdeka, Philippina tidak merdeka, Korea tidak merdeka, ja, Tiongkok tidak merdeka.

Sebab-sebabnja?

Sebab-sebabnja, sumber sebab-sebabnja, haruslah kita tjari didalam susunan dunia berapa abad jang lalu. Tiga empat ratus tahun jang lalu, didalam abad keenam-belas ketudju-belas, mal didunia Barat adalah selesai suatu perobahan susunan-masjarakat: feodalisme Eropah mulai surut sedikit persedikit, timbullah suatu kegiatan pertukangan dan perdagangan, timbullah suatu kelas pertukangan dan perdagangan, jang sekali berniaga diseluruh benua Eropah-Barat. Dan tatkala kelas ini mendjadi sekuat-kuatan tatkala merekapunja kedudukan mendjadi kedudukan ketjakrawartian, tatkala seluruh masjarakat Eropah-Barat bersifat merekapunja vroeg-kapitalisme, maka benua Eropah segeralah mendjadi terlalu sempit bagi perniagaannja. Terlalu sempit benua Eropah itu bagi usahanja berdjaja, kelintan membesar-besarkan tubuh dan anggotanja, terlalu sempit sebagai padang-permainan vroeg-kapitalisme itu! Maka timbullah suatu nasu, suatu stelsel, mentjainari padang-padang permainan dibenua-benua lain,- terutama sekudibenua Timur, dibenua Azia!

Masih ketjillah imperialisme¹⁾ ini pada waktu itu djauh lebih ketjil daripada imperialisme-modern dizaman sekarang! En toch dunia Timur waktu itu tiada kekuatan sedikitpun djua untuk menol imperialsme jang masih ketjil itu? Dimanakah kekuatan Hindustan, dimanakah kekuatan Philippina, dimanakah kekuatan Indonesia,- dimanakah kekuatan masjarakat Indonesia, jang dulu kataran mempunjai keradjaan-keradjaan gagah-sentau seperti Sriwidjaja, seperti Mataram kesatu, seperti Madjapahit, seperti Padjadjaran, seperti Bantara seperti Mataram kedua?

Ah, masjarakat Indonesia chususnja, masjarakat Azia umumnja, pada waktu itu kebetulan saja. Masjarakat Indonesia pada waktu itu adalah suatu masjarakat "in transtormatie", ja'ni suatu masjarakat jang sedang asjik "berganti bulu": feodalisme-kuno jang terutama sekali feodalisme Brahmanisme, jang tidak memberi djalan sepun djua pada rasa keperibadian, jang mengagap radja beserta bala-keningratannja sebagai pitalisan dewa dan mengagap Rakjat sebagai perkakas melulu daripada "titisan dewa" itu,- feodalisme-kuno itu dengan pelahan-pelahan dididat oleh feodalisme-baru, feodalismenja ke-Islaman jang sedikit lebih demokratis dan sedikit lebih memberi djalan pada rasa-keperibadian. Pertempuran antara feodalisme-kuno dan feodalisme-baru itu, jang pada lahirnja mitsalnja berupa pertempuran antara Demak dan Madjapahit, antara Banten dan Padjadjaran,- pertempuran antara

* Buat djelasnja imperialisme, lihatlah saja punja dooi, hoofdstuk II. Sekarang "Indonesia Mens Red.

feodalisme-kuno dan feodalisme-baru itulah seolah-olah membikin badan-masyarakat menjadi "demam" dan menjadi "kurang-tenaga". Memang tiap-tiap masyarakat "in transformatie" adalah seolah-olah demam. Dan memang tiap-tiap masyarakat yang demikian itu adalah "abnormal", lembek, kurang-tenaga. Lihatlah misalnya "demamnya" dan lembeknya masyarakat Eropah di zaman abad-pertengahan tatkala masyarakat Eropah pada waktu itu "in transformatie" dari feodalisme ke-vroeg-kapitalisme, lihatlah "demamnya" masyarakat Eropah itu juga satu-setengah-abad yang lalu tatkala "mlungsungi" dari vroeg-kapitalisme ke-modern-kapitalisme, lihatlah "demam"-nya masyarakat Tiongkok-sekarang yang juga sedang "berganti bulu" masuk ke tingkat kapitalisme. Tubuh masyarakat memang ta'beda dari tubuh manusia, ta'beda dari sesuatu tubuh yang hidup, yang juga tiap-tiap saat perubahannya membawa kesakitan dan kekurangan tenaga!

Hairankah kita, kalau masyarakat Indonesia, yang pada waktu datangnya imperialisme dari Barat itu kebetulan ada didalam keadaan transformatie, ta' tjukup kekuatan untuk menolaknya? Kalau imperialisme Barat itu segera mendapat kedudukan didalam masyarakat yang sedang bersakit demam itu? Kalau imperialisme Barat itu segera bisa menjadi tjakrawarti didalam masyarakat yang lembek itu? Satu-persatu negeri-negeri di Indonesia tunduk pada tjakrawarti yang baru itu satu-per-satu negeri-negeri itu lantas hilang kemerdekaannya. Satu-per-satu negeri-negeri itu lantas menjadi kepunjaannya Oost Indische Compagnie. Indonesia yang dahulunya, oondanks professor Veth, adalah Indonesia yang merdeka, pelahan-lahan menjadilah Indonesia yang semua daerahnya tidak merdeka. Rakjat Indonesia yang dahulunya berkeluh kesah memikul feodalismenja ke-radjaan dan keningratan bangsa sendiri, kini akan lebih-lebih lagi berkeluh-kesah memikul "berkah-berkahnya" stelsel imperialisme dari dunia Barat. Rakjat Marhaen, sebagai disairkan oleh sahabatnja prof. Veth, boleh terus menjanji :

"Tapi anak-pribumi sendiri ta'pernah kuasa"... Inilah asal-muasalnya kesialan nasib negeri Indonesia! Inilah pokok sebabnja permulaan negeri Indonesia menjadi negeri jg tidak merdeka: suatu masyarakat sakit jg kedatangan utusan-utusannya masyarakat yang gagah-perkasa,- utusan-utusan yang membawa keuletannya masyarakat yang gagah-perkasa, alat-alatnja masyarakat yang gagah-perkasa, ilmu kepandaiannya masyarakat yang gagah-perkasa. Masyarakat yang sakit itu tidaklah lagi mendapat kesempatan menjadi sembuh,- masyarakat yang sakit itu malahan makin lama makin menjadi lebih sakit, makin habis semua "kutu-kutunja", makin habis semua tenaga dan energiennja. Tetapi imperialisme yang menginggapinja itu sebaliknya makin lama makin berulur dan berakar, melantjar-lantjarkan tangannya kekanan dan kekiri dan kebelakang dan kedepan, melebar,mendalam, meliputi dan menjerapi

tiap-tiap masyarakat yang sakit itu. Imperialisme yang tatkala baru datang adalah imperialisme yang masih ketjil, makin lama makin menjadi haibat dan besar, menjadi raksasa maha-shakti yang seakan-akan ta' berhingga kekuatan dan energienja. Imperialisme raksasa itulah yang kini menggetarkan bumi Indonesia dengan djedjaknya yang seberat gempa, menggetarkan udara Indonesia dengan guruh suaranya yang sebagai guntur,- mengaut-aut dipadang kerezekian negeri Indonesia dan Rakjat Indonesia.

Imperialisme-raksasa inilah yang harus kita lawan dengan keberaniannya ksatria yang melindungi haknja!

2. DARI IMPERIALISME-TUA KE IMPERIALISME-MODERN

Tahukah pembatja bagaimana mekarnya imperialisme itu? Bagaimana ia dari imperialisme-ketjil menjadi imperialisme-raksasa, dari imperialisme zaman-dulu menjadi-imperialisme-zaman sekarang, dari imperialisme-tua menjadi imperialisme-modern? Bagaimana imperialisme-tua itu berganti bulu sama sekali menjadi imperialisme-modern, ja'ni bukan sahaja berganti bersarnya, tetapi juga berganti wujudnja, berganti sifatnja, berganti tjaranja, berganti sepak-terdjangnja, berganti wataknya, berganti stelselnja, berganti sistimnja, berganti segala-galannya,- dan hanja satu yang tidak berganti padanja, ja'ni kehausanja mentjahari rezeki?

Kamu belum mengetahui hal ini? Pembatja, imperialisme adalah dilahirkan oleh kapitalisme. Imperialisme adalah anaknja kapitalisme. Imperialisme-tua dilahirkan oleh kapitalisme-tua, imperialisme-modern dilahirkan oleh kapitalisme-modern. Wataknya kapitalisme-tua adalah berbeda besar dengan wataknya kapitalisme-modern. Sedang kapitalisme-tua belum kenal akan tempat-tempat-pekerdjaan sebagai sekarang, belum kenal paberik-paberik sebagai sekarang, belum kenal industri-industri sebagai sekarang, belum kenal bank-bank sebagai sekarang, belum kenal perburuhan sebagai sekarang, belum kenal tjara productie sebagai sekarang,- sedang kapitalisme-tua itu tjara productie-nja hanja ketjil-ketjil sahaja dan didalam segala-galannya berwatak kuno, maka kapitalisme modern adalah menundjukkan kemoderenan yang haibat sekali: tempat-tempat-pekerdjaan yang ramainya menulikan telinga, paberik-paberik yang asapnja menggelapkan angkasa, bank-bank yang tingginja mentjakar langit, perburuhan yang memakai ribuan-ketian kaum proletar, pembikinan barang yang tidak lagi menurut banjaknya pesanan, tetapi pembikinan barang yang hantam-kromo banjaknya sampai bergudang-gudang. Maka imperialisme-tua yang dilahirkan oleh kapitalisme-tua itu,- imperialisme-Oost Indische Compagnie dan imperialisme cultuurstelsel,- imperialisme-tua itu nistjajalah satu watak dengan "ibunja", ja'ni watak-tua, watak-

kolot, watak-kuno. Tidakkah kenal imperialisme-tua itu akan tjara-tjara "modern", tidakkah kenal ia akan tjara-tjara "sopan". Ia menghantam kekanan dan kekiri, menanam dan mendjaga stelsel monopoli dengan kekerasan dan kekedjaman. Ia mengadakan sistim paksa dimana-mana, ia membinasakan ribuan djiwa manusia, menghantujukan keradjaan-keradjaan dengan kekerasan sendjata, membasmi milliunan tananman tjengkeh dan pala jang membahayakan keuntungannya. Ia melahirkan aturan contingenten ¹⁾ dan leverantien ²⁾ jang sangat sekali berat dipikulnja oleh Rakjat, ia dengan terang-terangan melahirkan aturan-aturan jang memadamkan perdagangan Indonesia, ia dengan terang-terangan mendjalankan politiknya memetjah-metjah. Ia mendjalankan tindakan-tindakan kekerasan, jang menurut professor Snouck Hurgonje, "sukar sekali kita menahan kita punja rasa-djemu dan rasa-djidjik". Ia dizaman achir-achirnja melahirkan suatu stelsel kerdja-paksa baru, jang lebih kedjam lagi, lebih menguntungkan lagi, lebih memutuskan nafas lagi, ja'ni cultuurstelsel jang sebagai tjambuk djatuh diatas pundak dan belakangnja Rakjat. Ja, pendek-kata, sangat sekali "kuno" didalam sepak terdjangnja dan wataknya: paksaan dan perkosaan terang-terangan adalah ia punja njawa!

Tetapi lambat laun di Eropah modern kapitalisme mengganti Vroeg-kapitalisme jang sudah tua-bangka. Pabrik-pabrik, bingkil-bingkil, bank-bank, pelabuhan-pelabuhan, kota-kota-industri timbullah seakan-akan djampur dimusim dingin, dan tatkala modern-kapitalisme ini sudah dewasa, maka modal-kelebihannya alias surplus-kapital-nja lalu ingin dimasukkan di Indonesia, modern-imperialisme lalu mendjelma dimuka bumi, ingin menggantikan imperialisme-tua jang djuga sudah tua-bangka.

Ta' berhenti-henti begitulah saja tempo hari menulis dalam saja punja pleidooi-, ta' berhenti-henti modern-imperialisme itu memukul-mukul diatas pintu-gerbang Indonesia jang kurang lekas dibukanya, ta' berhenti-henti kampiun-kampiunnja modern-imperialisme jang ta' sabar lagi itu menghantam-hantam diatas pintu-gerbang itu. ta' berhenti-henti pendjaga-pendjaga pintu-gerbang itu saban-saban sama gemetar mendengar dengungnja pekik "naar vrij arbeid!", "kearah kerdja-merdeka!" daripada kaum-kaum modern-kapitalisme jang ta' mau memakai lagi sistim kuno jang serba paksa itu, melainkan ingin mengadakan sistim baru jang memakai "kaum-buruh merdeka", "penjawaan tanah merdeka", "persaingan merdeka", d.l.s. Dan achirnja, pada kira-kira tahun 1870, dibukalah pintu gerbang itu! Sebagai

* 1) Contingent = Serupa pajak, dibayar dengan barang-barang hasil bumi oleh kepala-kepala.

* 2) Leverantien = Kepala-kepala dipastikan setor barang-barang hasil-bumi jang dibeli oleh Compagnie. Tetapi banjaknja dan harganja barang itu Compagnie-lah jang menentukan!

angin jang makin lama makin meniup, sebagai aliran sungai jang makin lama makin membandjir, sebagai gemuruhnja tentara menang jang masuk kedalam kota jang kalah, maka sesudah Agrarische Wet dan Suikerwet-de-Waal didalam tahun 1870 diterima baik oleh Staten Generaal dinegeri Belanda, masuklah modal-partikelir di Indonesia,- mengadakan pabrik-pabrik gula dimana-mana, kebon-kebon teh dimana-mana, onderneming-onderneming tembakau dimana mana, dan lain sebagainya; tambahan lagi modal-partikelir jang membuka matjam-matjam perusahaan tambang, matjam-matjam perusahaan kereta-api, tram, kapal, atau pabrik-pabrik jang lain-lain. Imperialisme-tua makin lama makin laju, makin lama makin mati, imperialisme-modern mengganti tempat-tempatnya: Tjara pengambilan rezeki dengan djalan monopoli dan paksa makin lama makin diganti tjara-pengambilan rezeki dengan djalan persaingan-merdeka dan buruh merdeka, tjara-pengambilan rezeki jang menggai untung bagi "negeri" Belanda makin lama makin mengerut, terdesak oleh pengambilan rezeki setjara baru jang mengajakan modal partikelir.

Tjara pengambilan berubah, sistimnja berubah, wataknya berubah, tetapi banjakkah perobahan bagi rakjat Indonesia? Bandjir-harta jang keluar dari Indonesia bukan semakin surut, tetapi malah makin besar, drainage Indonesia malahan makin makan! "Ta' pernahlah untung bersih itu mengalirnja begitu deras sebagai djustru dibawah pimpinannya exploitant baru itu; aliran itu hanjalah melalui djalan-djalan jang lebih tenang", begitulah seorang politikus pernah menulis.....

Memang, bagi rakjat Indonesia perobahan sedjak tahun 1870 itu hanjalah perobahan tjaranja pengambilan rezeki; bagi rakjat Indonesia imperialisme-tua dan imperialisme-modern dua-dua tinggal imperialisme belaka, dua-dua tinggal pengangkutan rezeki Indonesia keluar pagar, dua-duanya tinggal drainage. Dan drainage inipun didalam zaman modern-imperialisme makin membandjir. Raksasa-imperialisme-modern itu tidak tinggal raksasa sahadja, raksasa-imperialisme-modern itu dikemudian hari mendjadilah raksasa jang bertambah kepala dan bertambah tangannya: Sedjak adanya opendeur-politiek ¹⁾ didalam tahun 1905, maka modal jang boleh masuk ke Indonesia dan mentjari rezeki di Indonesia bukanlah lagi modal Belanda sahadja, tetapi djuga modal Inggris, djuga modal Amerika, djuga modal Djepang, djuga modal Djerman, djuga modal Perantjis, djuga modal Italia, djuga modal lain-lain, sehingga imperialisme di Indonesia kini adalah imperialisme jang internasional karenanja. Raksasa-"biasa" jang dulu berdjengkelitian diatas padang kerezekian Indonesia, kini sudah mendjadi raksasa Rahwana Dasa muka jang bermulut sepuluh!

Dan bukan sahadja bermulut sepuluh! Djuga djalannya mentjari rezeki kini bukan satu djalan sahadja, tetapi djalan bertjabang-tjabang tiga-

1) Politik "pintu terbuka".

empat. Bukan lagi Indonesia hanya menjadi tempat pengambilan barang-barang-biasa sebagai zamanja imperialisme-tua, bukan lagi Indonesia hanya menjadi tempat pengambilan pala atau gendang atau meritja atau kaju-manis atau nila, tetapi kini

djuga menjadi pasar pendjualan barang-barang keluarannja keperberikan negeri asing, djuga menjadi tempat penanaman modal asing, jang dinegeri asing sendiri sudah kehabisan tempat.

pendek-kata : djuga menjadi afzetgebeid dan exploitatiegebied-nja surpluskapitaal.

Terutama "djalan" jang belakangan inilah, yakni "djalan" penanaman modal asing disini, adalah jang paling haibat dan makin bertambah haibat : paberik-naberik-gula bukan puluhan lagi tapi ratusan, onderneming teh dibuka dimana-mana, onderneming karet tersehar kesemua diurus, onderneming kopi, onderneming kina, onderneming tembakau, onderneming sereh, empat-tambang timah, tempat-tambang emas, empat pengeboran miniak, tempat-perusahaan-pesi, bingkil-bingkil, kapal-kapal dan tram-tram, semua itu adalah pendjelmannja penanaman modal asing disini. semua itu adalah menggambarakan bagaimana haibatnja raksasa itu memperusahakan Indonesia menjadi exploitatiegebied-nja surpluskapitaal. Ribuan, tidak. miliunan kerajaan jang saban tahun meninggalkan Indonesia, mengajakan modern-kapitalisme didunia Barat. Perhatikanlah angka-angka dibawah ini, perhatikanlah angka-angka daripada besarnja impor dan ekspor buat 1924—1930 1)

impor		eksport
1924	f 678.268.000	f 1.530.606.000
1925	f 818.372.000	f 1.784.798.000
1926	f 865.394.000	f 1.568.393.000
1927	f 871.732.000	f 1.624.975.000
1928	f 969.988.000	f 1.580.043.000
1929	f 1.072.139.000	f 1.446.181.000
1930	f 855.527.000	f 1.159.601.000 2)

Apa jang ternjata dengan angka-angka ini ? Dengan angka-angka ini ternjatalah apa jang saja dikatakan diatas : bahwa Indonesia adalah terutama sekali tempat penanaman modal asing, jang nisijaja barang-hatsilnja lalu dibawa keluar; bahwa Indonesia dus dihinggapi imperialisme jang terutama sekali mengekspor, imperialisme jang didalam nasa jang "normal" rata-rata dua kali djumlah gannja rezeki jang ia angkuti keluar dari pada jang ia masukkan kedalam; bahwa Indonesia dus sangat sekali menderita drainage.

Amboi, rata-rata dua kali gandanja ekspor daripada impor ! — begitulah saja tempohari menulis dalam "Suluh Indonesia Muda"-, rata-rata dua

kali gandanja ekspor daripada impor, bahwasanja, memang suatu bandingan jang tjelaka sekali, suatu bandingan jang memang memegang rekor daripada semua drainage jang ada diseluruh muka bumi ! Indonesia jang tjelaka ! Sedang bandinganja ekspor/impor dinegeri-negeri djadjaan jang lain-lain ada "mendingan", sedang bandingan itu didalam tahun 1924

buat Afrika Selatan adalah	118,7/100
buat Philippina	123,1/100
buat India	123,3/100
buat Mesir	129,9/100
buat Ceylon	132,8/100,

maka buat Indonesia ia menjadi jang paling tjelaka, yakni 220,4/100 ! Dua ratus dua puluh koma empat prosen besarnja ekspor dibandingkan dengan empor, — hairankah kita, kalau seorang ahli ekonomi sebagai Professor van Gelderen tersiasia mentjari angka jang lebih tinggi, dan berkata bahwa "kalau dibandingkan angka-angka di Hindia dengan angka-angka negeri lain, maka ternjatalah bahwa tidak ada satu negeri dimuka bumi iri jang prosentasenja begitu tinggi seperti Hindia-Belanda" ? Hairankah kita, kalau seorang komunis C. Santin, jang toch biasa melihat angka-angka jang "kedjam", menjebutkan imperialisme di Indonesia itu suatu imperialisme jang "mendirikan bulu" ?

Dua ratus dua puluh koma empat prosen besarnja ekspor, — dan apakah jang di-ekspor keluar itu ? Jang di-ekspor keluar ialah terutama sekali "hatsil-onderneming" dan minjak. Jang di-ekspor ialah gula, karet, tembakau, teh, minjak-tanah, bensin, dan lain sebagainya, jang menurut angka-angka diatas tahadi total-djenderalnja dizaman "normal" paling "anes" f 1.500.000.000.- zegge : seribu lima ratus djuta roviah setahun-tahunnja sebagaimana buat pertjontohan saja sadjikan dibawah ini : 1)

Hatsil-hatsil minjak tanah total	f 149.916.000
Arachides	4.335.000
Karet	417.055.000
Damar	9.911.000
Kopra	73.083.000
Gambir	1.194.000
Getah-Pertja	1.895.000
Djelutung	2.073.000
Topi	2.405.000
Kaju	9.106.000
Kulit	16.067.000
Babakan kina	5.454.000
Pil kina	1.821.000
Kopi	74.376.000
Djagung	4.033.000
Kain-kain	5.425.000
Minjak-minjak (dari tanaman) total	11.765.000
Pinang	7.307.000
Rotan	8.521.000
Beras	2.373.000

1) Angka-angka buat tahun 1937



INDONESIA tanah Jang Kaja

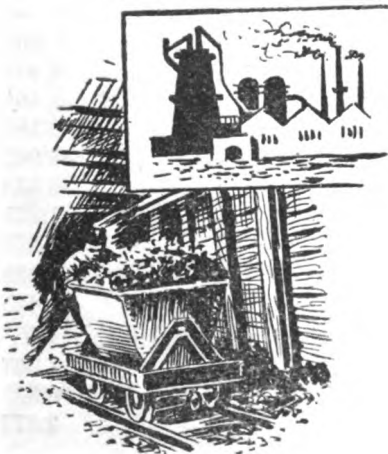
←
KELAPA

KARET
→



←
TJENGKEH

TEBU
→



←
BATUBARA

TIMAH
→



Rempah-rempah total	33.409.000
Spiritus	3.125.000
Arang-batu	5.019.000
Gula total	365.310.000
Tembakau total	113.926.000
Tepung ketela	21.423.000
Teh	90.220.000
Timah total	93.864.000
Bungkil	4.132.000
Kapuk, serat nanas, dll.	38.250.000
Lain-lain hal	42.484.000

Total-djenderal f 1.622.278.000

Ini daftar daripada „makan djalan” didalam pesta untuk merajakan „beschaving-en-orde-en-ist” jang djadi tjangkingannja imperialisme modern di Indonesia! Perhatikanlah nama-nama an angka-angka jang ditjetak dengan huruf tebal: etjual minjak-tanah dan timah, maka nama-nama itu adalah semuanya nama-nama hatsil onderneming landbouw”, dan semuanya angka-angka jang paling gemuk. Karet sekian milliun, kopra sekian milliun, kopi sekian milliun, minjak-minjak-tanaman sekian milliun, gula sekian milliun, tembakau, teh, kapuk, serat-nanas sekian milliun, — dari delapan matjam hatsil onderneming landbouw ini sahadjja djumlah ekspor adah f 1.186.986.000, atau kurang lebih 75% dari semua djumlah ekspor jang f 1.622.278.000 itu! Konklusi? Konklusi ialah, bahwa imperialisme-modern jang mengaut-aut dipadang perekonomian Indonesia itu ialah terutama sekali imperialisme-pertanian, atau lebih tegas: landbouw-industrieel-imperialisme. Konklusi ialah, bahwa bagi perdjangan kita adalah sangat sekali pentingnja kita antara lain-lain mengadakan sarekat-sarekat-tani, sebagai nanti akan kita terangkan dibagian 8 dari ini risalah.

„Makan dialan” ekspor setahun-tahunnja rata-rata f 1.500.000.000 rupiah: Tetapi berapakah bearnja untung jang didapattja dari pendjualan arang jang sekian milliun itu? Ondernemersraad, yakni serikatnja kaum modal sendiri, memberi jawab sendiri jang terus terang diatas pertanyaan ini: setahun-tahunnja mereka mendapat untung sebesar 9% a 10% dari modal induknja, — didalam tahun 1924 sedjumlah f 490.000.000, didalam tahun 1925 sedjumlah f 540.000.000, didalam setahun-tahunnja dus rata-rata f 515.000.000. Untung bersih lima ratus limabelas milliun rupiah setahun, dan ini adalah 9% a 10% dari merekanunja modal-induk! Mendiadi dus merekanunja modal-induk, yakni djumlahnja semua modal iang ditajam di Indonesia, adalah $100/9 \times f 515.000.000 = f 5.722.000.000$, atau hampir f 6.000.000.000! Amboi, semua angka-angka hanja milliunan sahaja, tidak ada jang ribuan, ja, tidak ada iang ketian tau laksana! Djumlah modal: enam ribu milliun,

djumlah harganja barang jang saban tahun diangkut keluar kepasar dunia: seribu lima ratus milliun, djumlah untung bersih saban tahun: lima ratus limabelas milliun!

Sedang bagi Marhaen, jang membanting tulang dan berkeluh-kesah mandi keringat bekerdja membikinkan untuk sebesar itu, rata-rata didalam zaman „normal” tak lebih dari delapan sen seorang sehari.....

3. "INDONESIA, TANAH JANG MULJA, TANAH KITA JANG KAJA; DISANALAH KITA BERADA, UNTUK SELAMA-LAMANJA!"...

Ja, didalam zaman „normal”, sebelum meleset, tak lebih dari delapan sen seorang sehari. Dan inipun bukan hisapan-djempol kaum pembohong, bukan hasutannja kaum penghasut, bukan agitasinja pemimpin-agitator. Ini ialah suatu kenjataan jang njata dan jang telah dibuktikan oleh ahli-pengetahuan bangsa Belanda sendiri. Memang siapa jang bertulus hati dan bukan orang munafik dan durhaka haruslah mengakui keadaan itu. Memang hanja orang munafik dan durhaka sahadjjalah jang tak berhenti-henti berkemak-kemik: "Indonesia sedjahtera, Rakjatnja kenjang-senang".

Tetapi angka-angka tak dapat dibantah lagi. Dr. Huender telah mengumpulkan angka-angka itu. Ia membikin perhitungan dari semua inkomsten dan uitgaven-nja Kang Marhaen, dari semua masuknja-rezeki dan keluarnja-rezeki Kang Marhaen. Ia membikin perhitungan dari semua inkomsten tidak dari "kabar-kabar-bikinan", tetapi dari verslag-verslag resmi sendiri. Ia berdiri seobjektif-objektifnja, — ia sama tengah, tidak menjebelah kesana, tidak menjebelah kesini. Ia oleh karenanja, harus dipertjaja oleh tiap-tiap orang jang mau bertulus hati.

Ia membagi pendapatan Kang Marhaen itu dalam tiga bagian: pendapatan dari padinja, pendapatan dari palawidjanja, pendapatan dari perkuliannja bilama Marhaen tengah "vrij". Dan bagaimanakah menurut Dr. Huender rupanja Kang Marhaen punja "makan-djalan"? Bagaimanakah pendapat-pendapatannja itu masing-masingnja? Lihatlah "daftar" dibawah ini:

Ia mendapat padi seharga	f 103.—
Ia mendapat palawidja seharga	f 30.—
Ia mendapat hatsil-perkulian	
sedjumlah	f 25.—

Ia dus mendapat hatsil total-djenderal f 158.—

zegge: seratus limapuluh delapan rupiah Hindia-Belanda, — didalam zaman sebelum meleset! 1) Dan inipun pendapatan kotor. Sebab dari "keka-

1) Ini pendapatan Marhaen tani. Kalau diambil semua Marhaen, rata² f 161.—

jaan" f 158 itu Kang Marhaen masih harus membayar ia punja pengeluaran : membayar ia punja landrente, membayar ia punja padjak-kepala, membayar ia punja Inlandse Verponding, membayar ia punja padjak lain-lain. Dari "kekajaan" f 158 itu Kang Marhaen menurut Dr. Huender masih harus mengeluarkan lagi total-djenderal f 22.50. 2) Dua puluh dua setengah rupiah dari seratus limapuluh delapan rupiah, pendapatan bersih adalah dus total-djenderal :

f 158 — f 22.50 = f 135.50 !

f 135.50 buat duabelas bulan, dan buat makan seanak-bini !

Belum sampai f 12.— sebulan-bulannja !

Belum sampai f 0.40 sehari-harinja !

Belum sampai delapan sen seorang sehari ! 3)

Sehingga djuga didalam hal ini Indonesia pegang rekor; diseluruh mukabumi dari Barat sampai Timur sampai Utara sampai Selatan tidak ada angka jang begitu rendahnja; dinegeri Bulgaria, negeri jang terkenal paling melarat, orang masih hidup dengan tigabelas sen sehari. Kita tidak hairan, kalau Dr. Huender berkata, bahwa Marhaen adalah Rakjat "Minimum-lijdster", jaitu Rakjat jang sudah begitu keliwat melaratnja, sehingga kalau umpamanja dikurangi lagi sedikit sahadja bekal-hidupnja, nistjaja ia djatuh samasekali, maut samasekali, binasa samasekali !

Dan Dr. Huender-pun tidak berdiri sendiri; puluhan orang bangsa Belanda lain jang djuga berpendapat demikian; puluhan orang bangsa Belanda lain jang djuga mengakui bahwa Marhaen adalah papa-sengsara. Tapi tidak ada gunanya menjebutkan nama-nama itu satu per satu didalam risalah jang akan dibatja oleh kaum Marhaen. Kaum Marhaen sendiri merasakan kapapaan dan kesengsaraan itu saban hari, saban djam, saban menit. Kaum Marhaen sendiri merasakan saban hari, bagaimana mereka kekurangan segala-galannja, — kekurangan bekal-hidup, kekurangan-pakaian, kekurangan benda rumah-tangga, kekurangan bekal pendidikan anaknja, kekurangan tiap-tiap keperluan-manusia walau jang paling sederhanaupun djua adanja.

En toch, barangkali risalah ini dibatja oleh fihak „twijfelaars" alias fihak „raguragu" dikalangan kita punja intellectuelen jang karena terlampau kenjang „tjekokan kolonial" tidak pertjaja bahwa Marhaen papa-sengsara ? Buat kaum „twijfelaars" itu saja hanja tahu satu obat mandjur jang akan melenjapkann segala keragu-raguannja; buat kaum „twijfelaars" itu saja punja resep hanjalah : „Pergilah kekalangan kaum Marhaen sendiri njatakannlah hal itu dikalangan kaum Marhaen sendiri !" Maka kamu akan melihat dengan mata

2) "Kerdja-desa", — desa-dienster, mitsalnja ronda, bikin betul dialan-desa, membikin djembatan-desa dll. oleh Dr. Huneder di-"rupakan uang", lalu dimasukkann disini.

3) Marhaen, bininja dan anaknja jang rata-rata 3 orang.

sendiri, mendengar dengan telinga sendiri kebnarannja perkataan Professor Boeke jang beibunji, bahwa hidupnja bapak tani adalah hidup „ellendig", hidup jang "sengsara keliwat sengsara", — atau kebenarannja perkataan Schmalhausen, bahwa masjarakat kita adalah masjarakat "waar nagenoeg niemand iets bezit", jaitu masjarakat "jang hampir tidak ada seorang djuapun mempunjai milik apa-apa".

Dan barangkali ada djuga faedahnja bagi kaum ini saja meniadjikan lagi beberapa angka ? Marilah, djikalau memang begitu, kita sadjiki sedikit angka-angka statistik. Marilah kita menambil angka-angka-statistik hikinan pemerintah sendiri. 1) Maka kita disitu mendjumpai angka angka jang tidak banjak beda dari angka-angka Dr. Huender tahadi. Kita melihat disitu, bahwa diseluruh Indonesia djumlah Marhaen (semua angka-angka adalah angka-angka zaman "normal") jang mempunjai perniagaan jang hatsalnja lebih dari f 120 setahun hanjalah 1.172.168 orang dus belum 2 tiap-tiap 100; bahwa ternak Marhaen jang berupa lembu hanjalah 145 per seribu orang.

Kita melihat bahwa djikalau mitsalnja Kaum Marhaen itu menjadi kuli dipaberik gula, upahn rata-rata hanjalah f 0.45 sehari, dan bahwa dikalau mBok Marhaen jang menjadi kuli, upah i lantass mendiadi rata-rata hania f 0.37 sehari artinia, djika dimakan seisi rumah : tak lebih dari f 0.08 a f 0.09 seorang sehari. Kita melihat bahwa lebarnja milik tanah tiap-tiap orang Marhaen rata-rata hanjalah kurang-lebih satu bahu sedang beribu-ribu bahu diberikan erfpacht, sedang dinegeri Belanda orang tani jang miliknja 5 bahu sudah disebutkan "keuterboer". Tani jang lebih ketiil dari ketiil". Kita melihat, bahwa tanah-pertanian jang ditanami oleh Marhaen hanjalah rata-rata 0.29 bahu, sehingga Marhaen bukanlah keuterboer. tetap..... tani-gurem. Kita melihat — dan kini kita mengambil permaklumann volksraad-, bahwa dimana duapuluh lima tahun jang lalu 71% dari kaum Marhaen masih bisa bertani-melulu, kini tinggal 52% sahadjalah ia bisa bertani-melulu. Kita melihat, tetapi ah, marilah saja berhenti, marilah saja sudah "daftar" ini sampai disini sahadja, — ia mendjij mendjemukan !

Marilah kita lebih baik membuka surat-surat-chabar, dan kita saban hari bisa mengumpulnkan beberapa "sjair megatruh" jang "menakutkan hati", jang melagukan betapa hidupnja Kaum Marhaen, jang didalam zaman "normal" sudah "sekarang makan besok tidak" itu, didalam zaman meleset sekarang ini mendjadi lebih-lebih ngeri lagi lebih-lebih memutuskan njawa la megap-megap lagi.

"Darmokondo", 11 Juli 1932 :

1) Statistik jaaroverzicht tahun 1928

"Dikampung Pagelaran Sukabumi ada hidup itu suami isteri bernama Musa dan Unah, dengan ia punja anak lelaki jang kesatu berumur 5 tahun jang kedua 3 tahun dan jang ketiga baru 1 tahun. Itu familie ada sangat melarat, dan sudah beberapa bulan ia tjuma hidup sadja dengan daun-daunan dalam hutan, jang ia makan buat antinja nasi. Lama-kelamaan itu suami isteri merasa jang ia tidak bisa hidup selama-lamanja dengan tjuma makan itu matjam makanan sadja. Buat sambung ia punja djiwa serta anak-anaknja, itu suami isteri telah dapatkan satu fikiran, jaitu djual sadja anaknja pada siapa jang mau beli".

"Pertja Selatan", 7 Mei 1932 :

"Pegadaian penuh, sebab tidak ada jang menelus. semua menggadai. Sekarang gadaian kurang. ni barang aneh! Sebab mustinja naik! Bagi ia tidak aneh. Ini tandanja barang-barang jang kan digadai sudah habis! Tandanja miskin dan habis-habisan!

Didesa oang-orang 2 hari sekali makan nasi, selainnja makan ubi. tales, singkong, djantung pisang. Sudah sebagai sapi".

"Aksi", 14 November 1931 :

"Didesa Banaran dekat Tulung Agung kemarin-tulu orang sudah djadi ribut, lantaran ada orang antung diri.

Duduknja perkara begini : Sudah lama ia senak bininja merasa sengsara sekali, malahan anaknja jang masih ketjil sekali sering di-emiskan esi pada orang sedesa situ. Saben hari ia tjari erdia berangkat pagi pulang sore, tapi sia-sia, tidak ada orang jang butuh kuli. Kemarin dulu ia tidak hepergian, tjuma duduk termenung dirumah hadja, runa-rupanja sudah putus-asa dan bingung mendengarkan anaknja menangis minta makan. Tahu-tahu dia sudah ketemu mati (gantung diri)".

"Siang Po", 23 Januari 1933 :

"Didekat kota Krawang sudah kedjadian barang jang sangat bikin ngenes ati. Ada orang djanda amanja Upi, punja anak ketjil. Dia punja laki perusan mati, sebab sakit keras jang tjuma satu minggu lamanja. Upi memang dari sedari hiduonja ia punja laki ada sanget melarat sekali, tapi sesudah ia diadi djanda, kemelaratan rupania tidak da bates lagi. Lama-lama Upi sudah djadi putus-asa, dan anaknja jang ia tjintain itu sudah ia tarkan sama tuan L.K.B. di Krawang. Ditanja na sebabnja ia mau djual anaknja, ia tidak djwab apa-apa, tjuma mendjatuhkan air mata bertuturan. Tuan L.K.B. sangat kasian sama dia, n kasih uang sekedarnja pada itu djanda jang alang".

"Pewarta Deli", 7 December 1943 :

"Dikota sering ada orang jang menjamperi

pintu bui, minta dirawat dibui sadja, sebab merasa tidak kuat sengsara. Dibui misih kenjang makan, sedang diluar belum tentu sekali sehari"...

"Sin Po", 27 Maart 1933 :

"Mentjuri ayam sebab lapar. Di hukum djuga 9 bulan.

Malaise heibat jang mengamuk dimana-mana telah bikin sengsara dan kelaparan penduduk desa Trogong Kebajuran.

Penduduk disitu rata-rata suda tidak bisa dapatkan uang dan baniak jang kelaparan kerna tidak punja duit buat beli makanan.

Salah satu orang nama Pungut djuga alanken itu kasukeren jang heibat. Ia ada punja bini dan dua anak, sedeng penghasilan sama sekali telah kapempet berhubung dengan djaman susa. Sementara itu ia punja beras dan makanan suda abis.

Apa boleh buat, saking tida bisa tahan sengsara kerna sudah 2 hari tida punja beras, pada satu malem ia bongkar kandang ayam dari tetanggania nama Djaja dan dari ia timpa 2 ekor ayam.

Itu binatang kamudian ia djual di pasar buat 3 nitiis dan dari itu uang ia beli beras 15 cent.

Blakangan Pungut ditangkap dan dibui. Pada tanggal 25 Maart ia mesti mengadep pada landraad di Mr. Cornelis dan Pungut itu sadja betul telah tjolong itu 2 ekor ayam sebab suda 2 hari ia tida makan.

Landraad anogep ia terang bersalah ambil ayamnja laen orang dan Pungut dihukum 9 bulan. Anak bininja menangis diluar ruangan Landraad! (Rep.)

Enz., enz., enz.!

Aduhai, — dan didalam zaman air-mata ini, dimana Marhaen terpaksa hidup dengan seenggol seorang sehari, dimana beban-beban jang harus dipikul Marhaen semakin mendiadi berat, dimana menurut verslag Voorzitter Kleine Welvaart-commissie penghatsilan dari perusahaan-perusahaan-ketjil didesa-desa dan dikampung-kampung sudah turun dengan 40 sampai 70%, dimana kesengsaraan sering membikin Marhaen mendiadi putus-asa dan gelap-mata, sebagai ternjata dari kabar-kabar diatas. — didalam zaman air-mata ini Marhaen ditanah Djawa masih harus memelihara diuga hiduonja ribuan orang kuli-kontrakan, jang dinulangkan dari Deli dan lain sebagainya zonder tundjangan sepeserpun djua, jang seolah-olah untuk membuktikan isinja peribahasa: "habis manis sepah dibuang". Ja, semelarat-melaratnja Marhaen, maka Marhaen selamanja masih "ridla membahagi kemelaratanja itu dengan orang jang lebih melarat lagi daripadania", — begitulah Schmalhausen menulis. Ja, imperialisme mengetahui ketinggian budi Marhaen itu: kuli-kuli jang ia lepas tidak usah diambil pusing, — toch nanti mereka dapat makan djuga dari kawan-kawannya didesa-desa dan dikampung-kampung!

Sedang kaum "werkloos" bangsa asing disini mendapat tundjangan. Sedang kaum "werkloos" dihampir tiap-tiap negeri jang sopan mendapat penjambang njawa. Sedang kaum "werkloos" dinegeri Belanda mendapat uitkering f 2.— sehari. Sedang ja sedang Kang Marhaen, walaupun umpamanja ia tidak "werkloos", walaupun ia membanting-tulang dan mandi keringat diatas ladangnja dari sjubuh sampai magrib, harus tahan njawanja dengan sebenggol sehari.....

Aduhai, kemanakah Marhaen harus menjimpaukan njawanja jang penuh dengan keteduhan itu? Jang penuh dengan ratap dan penuh dengan tangis, penuh dengan kemalangan dan penuh dengan kesedihan, penuh dengan sakit dan penuh dengan lapar? Didalam zaman "normal", bilamana kaum imperialis berpesta dan bersuka-raja menz-eksport barang kehatsilannja jang lebih dari f 1.500 000 000 setahunnja itu, ia hanjalah mendapat nafkah-hidup f 0.08 seorang sehari; didalam permulaannja zaman meleset, menurut "Economisch Weekblad", ia hanjalah makan f 0.04 seorang sehari; dan didalam tengah-tengahnja zaman meleset, tatkala menurut angka statistik ekspornja kaum imperialis setahunnja toch masih sahadjja tidak kurang dari f 1.159.000 000, ia terpaksa mempertahankan njawanja dengan sebenggol seorang sehari! Garis-penghidupannja memang penuh dengan tjorek-tjorek kemalangan; garis-penghidupannja itu tidak pernah naik, garis-penghidupannja itu senantiasa menurun. Lebih dari seperempat abad iang lalu voorzitter "Mindere Welvaartcommissie" telah mengatakan, bahwa iapunja peri-kehidupan adalah didalam "tuitelig evenwicht", peri-kehidupan jang gampang terpelanting; seperempat abad kemudian orang mengatakan bahwa ia adalah "minimumlijder"; dan kini tiga-empat tahun kemudian lagi, Marhaen boleh hidup dengan sebenggol sehari dan memberi diuga makan pada ribuan lepanan kuli-kontrak. Didalam tempo jang kurang dari tigapuluh tahun itu, modern-imperialisme, jang senantiasa mengagul-agulkan iapunja "kesopanan" dan "ketenteraman umum", telah melihat kans "memperbaiki" nasib Marhaen dari setengah hidup mendiadi setengah megap-megap!

Tetapi, apakah memang lenar, imperialisme samasekali tidak ada "berkah" sedikit djuapun bagi kita bangsa Indonesia? Tidakkah ia mendatangkan beberapa kemadjuan, mendatangkan pengetahuan, mendatangkan "beschaving"? Tidakkah dus modern-imperialisme itu "ada baiknja" djuga? O, memang, zaman modern-imperialisme mendatangkan "beschaving", zaman modern-imperialisme mendatangkan dialan lorong jang indah dan djalan-djalan kereta-api jang haibat, zaman modern-imperialisme medatangkan perhubungan kapal jang sempurna, mendatangkan "ketenteraman", mendatangkan "perdamaian" mendatangkan telepon, mendatangkan telegrap, mendatangkan lampu listrik, mendatangkan radio, mendatangkan kedokteran, mendatangkan ke-teknikan, ja, mendatangkan kepandaian barang

apa sahadjja sampai jang mendekati kepandaian nja djin-peri-perajangan,- tetapi, adakah semua hal itu didatangkannja buat keperluan Marhaen? Adakah semua hal itu, sekalipun umpamanja didatangkan buat keperluan Kang Marhaen, bisa ditimbangkan dengan bentjana-hidup jang disebar-sebarkan oleh modern-imperialisme dikalangan Kang Marhaen? Adakah tidak lebih mirip kepada kebenaran, perkataannja Brailsford jang berbunji bahwa: "anugerah-anugerah pendidikan, kemadjuan dan aturan-aturan bagus jang ia bawa itu hanjalah rontokan-rontokan sahadjja dari iapunja keasjikan tjara-rezeki jang angkara-murka itu"?

Lagipula, adakah berhadapan dengan bentjana-hidup jang disebar-sebarkan oleh modern-imperialisme ini Marhaen mendapat tjukup hak-hak dari pemerintah jang sekedar boleh dianggap sebagai "obat" bagi hatinja jang luka, fikirannja jang bingung, perutnja jang lapar? Onderwijs? Oh, didalam "abad-kesopanan" ini, begitulah saja tempohari mendjawab-, didalam "abad kesopanan" ini, menurut angka-angka Kantor Statistik orang laki-laki jang bisa membuat dan menulis belum ada 7%, orang perempuan belum ada 0,5%. Pajak-pajak enteng? Menurut penjelidikannja Institute of Financial Investigation dinegeri Tiongkok, Indonesia didalam hal pajak djuga pegang rekor Kesehatan rakjat atau hygiene? Diseluruh Indonesia hanjalah ada 343 rumah sakit guperment kematian bangsa Bumiputera ta' kurang dari 20/1000, dikota besar kadang-kadang sampai 50/1000. Perlindungan kepentingan kaum buruh? Peraturan sociale arbeidswetgeving jang melindungi kaum buruh terhadap pada kaum modal ta' ada samasekali, arbeidsinspectie tinggal nanjanja sahadjja, hak-mogok, jang didalam negeri jang sopan bukan soal lagi, dengan adanya artikel 161 bis dari buku hukum siksa musnahlah sama sekali daripada realiteit, terkabutkan sama sekali mendjadi impian belaka! Kehakiman jang sempurna? Batjalah sahadjja pendapatnja Mr. Sastromuljono tentang hal ini tatkala membela perkara saja, atau bandingkanlah tjara-bekerdjannja landraad dan Raad — van Justitie. Kemerdekaan drukpers dan hak-berserikat-dan-bersidang? Amboi, adakah disini hak kemerdekaan drukper dan hak berserikat-dan-bersidang? Adakah disini hak-hak itu, dimana buku hukum siksa masih men-tereng dengan artikel-artikel sebagai 153 bis-ter-154, 155, 156, 157, 161 bis d.l.s., dimana hak "peng-Digul-an" masih ada, dimana perkataan "berbahaja bagi keamanan umum" terdengar sehari-hari dimana ada pers-breidel-ordonantie, dimana rupa tertutup "kalau perlu" djuga boleh dihadiri oleh polisi, dimana stelsel-mata-mata boleh dikata sempurna samasekali, dimana diwaktu jang achir achir ini puluhan openbare vergadering dibubarkan?

"Tidak! Disini tidak ada hak-hak itu!" Dengan matjam-matjam halangan dan matjam-matjam randjau demikian itu, maka kemerdekaan itu ting

namanja sahadja hak; dengan matjam-matjam namanja sahadja kemerdekaan, hak itu ting-mpatan jang demikian, maka kemerdekaan-kpers dan hak-berserika-t-dan — bersidang itu adjadi suatu bajangan belaka, suatu impian! mpir tiap-tiap journalist sudah pernah meran tangannja hukum, hampir tiap-tiap pe-mpin Indonesia sudah pernah merasakan bui, mpir tiap-tiap orang bangsa Indonesia jang ngadakan perlawanan — radikal lantassahadja pandang "berbahaja bagi keamanan umum".), Marhaen, hidupmu sehari-hari morat-marit i kotjar-katjir, beban-bebanmu semakin berat, t-hakmu boleh dikatakan tidak ada sama-skali ! ahwasanja, kamu boleh menjanji :

"Indonesia, tanah jang mulia,
Tanah kita jang kaja;
Disanalah kita berada,
Untuk selama-lamanja !"

4. "DI TIMUR MATAHARI MULAI BERTJAHAJA, BANGUN DAN BERDIRI KAWAN SEMUA !"

etapi hal-hal jang saja tjeritakan diatas ini njalah kerusakan lahir sahadja. Kerusakan thin pun ternjata dimana-mana. Stelsel perialisme jang butuh pada kaum buruh itu, lah memutarkan semangat kita mendjadi se-angat perburuhan samasekali, semangat perbu- nan jang hanja senang djikalau bisa mengham- Rakjat Indonesia jang sediakala terkenal se-agai Rakjat jang gagah-berani, jang ta' gampang-mpang suka tunduk, jang perahu-perahunja lintasi lautan dan samodra sampai ke India, ngkok, Madagaskar dan Persia, — Rakjat onesia itu kini mendjadilah Rakjat jang ter- nal sebagai "het zachtste volk der aarde", rakjat jang paling lemah hudi diseluruh muka ni". Rakjat Indonesia itu kini mendjadi suatu kjat jang hilang kepertjajaannya pada diri diri, hilang keperibadiannya, hilang kegagahan- , hilang ketabahannya samasekali. "Semangat imau" jang menurut katanja professor Veth lah semangat Rakjat Indonesia dizaman sedia- a, semangat itu sudah mendjadi semangat kam- g jang lunak dan pengetjut.

Dan itupun belum bentjana-bathin jang paling ar! Bentjana bathin jang paling besar ialah ban- Rakjat Indonesia itu p e r t j a j a, bahwa ia me- ng adalah "Rakjat-kambing" jang selamanja ha- dipimpin dan dituntun. Sebagai djuga tiap-tiap sel imperialisme dimana-mana, maka stelsel im- ialisme jang ada di Indonesia-pun selamanja nggembar-gemborkan kedalam telinga kita, wa maksudnja bukanlah maksud mentjari eki, tetapi ialah "maksud sutji" mendidik kita i kebodohan kearah kemandjauan dan ketjerda- . Sebagai djuga tiap-tiap stelsel imperialisme, a' djemu-djemu meneriakkan iapunja "mission- ee" 1) Diatas pandji-pandjinja imperialisme se-

Mission-sacree = Suruhan sutji.

lamanja adalah tertulis sembojan-sembojan dan anasir-anasir "beschaving" dan "orde en rust",- "keseponan" dan "keamanan umum".

"Kesopanan" dan "keamanan umum"! Tidakkah kita ini katanja Rakjat jang masih bodoh dan biadab, jang perlu mendapat guru dan perlu mendapat bapak? Amboi, seolah-olah benar kita pada saat datangnya imperialisme masih bodoh, seolah-olah benar kita zaman dulu Rakjat biadab! Seolah-olah Rakjat kita tidak pernah mempunjai cultuur jang membikin tertjengangnja dunia! Djikalau benar stelsel imperialisme tidak buat mentjari rezeki, tidak buat "urusan-fulus", tidak buat memenuhi nafsu perbendaan, djikalau benar stelsel imperialisme dahaga sekali akan "kerdja menjopankan", apakah sebabnja stelsel imperialisme datang lebih dulu pada Rakjat-Rakjat jang djustru berketinggian cultuur, sebagai Indonesia, sebagai India, sebagai Mesir, dan tidak pergi sahadja kenegerinja bangsa Eskimo jang ada di- kutub Utara!

Tidak, memang tidak! Itu "suruhan sutji" ha- njalah omong kosong belaka, itu "mission sacree" hanjalah buat mendjaga kedudukannya imperialisme sahadja. Sebab tidak ada satu imperialisme dimuka bumi jang bisa terus-menerus mengambil rezeki sesuatu Rakjat, sehingga Rakjat itu t a h u dan i n s j a f bahwa rezekinja diambil dan di- angkuti; tidak ada satu imperialisme jang "tahan lama", bilamana rakjat i n s j a f bahwa badannya adalah sebagai pohon jang dihinggapi kemadean jang hidup daripada iapunja zat-zat hidup. Maka oleh karena itulah Rakjat lantassahadja di-injeksi ta' berhenti-henti, bahwa imperialisme datangnya ia- lah buat memenuhi suatu "suruhan jang sutji" mendidik Rakjat itu dari kebodohan kearah ke- tjerdasan, mendidik Rakjat itu dari kemunduran kearah kemandjauan. Dan Rakjat lantassahadja akan "suruhan sutji" itu; imperialisme tidak lagi dipandang olehnja sebagai inusuh jang harus dijenjahkan selekas-lekasnja, tidak sebagai ke- madean jang menghinggapi tubuhnja, imperialisme lantassahadja dipandang olehnja sebagai s a h a b a t jang harus diminta terima kasih

Jawaharlal Nehru, itu pemimpin Hindustan jang kenamaan, pernah berkata : "Kebesarannya negeri dan Rakjat kita adalah sudah begitu dalam ter- benamnya oleh kabut-kepurbakalaan, dan kebesa- rannya imperialisme adalah begitu sering kita lihat sehari-hari, sehingga kita l u p a bahwa kita bisa besar, dan mengira bahwa h a n j a kaum impe- rialisme sahadja jang bisa pandai". Perkataan Jawaharlal Nehru ini, jang menggambarkan ke- rusakan bathinnja Rakjat Hindustan, satu per- satannya bolehlah djuga dipakai untuk Rakjat Indonesia sekarang ini. Djuga k i t a lupa bahwa kita bisa mendjadi besar djuga k i t a lupa bahwa kemunduran kita ialah k a r e n a kita terlalu lama sekali kena pengaruh imperialisme, djuga k i t a lupa bahwa kemunduran kita itu b u k a n suatu kemunduran jang memang karena n a t u u r, tetapi ialah suatu kemunduran jang karena

imperialisme, suatu kemunduran bikinan, suatu kemunduran "tjekokan", suatu kemunduran injeksian jang berabad-abad. Djuga kita mengira, bahwa h a n j a kaum imperialisme sahaja jang bisa pandai, bahwa h a n j a mereka sahaja jang bisa berilmu, bisa membikin djalan, bisa membikin kapal, bisa membikin listrik, bisa membikin kereta-api dan auto dan bioskop dan kapal-udara dan radio, — dan ta' pernah satu kedjap mata kita bertanja didalam hathin, apakah kita kini djuga tidak bisa mengadakan semua hal itu, umpamanya kita tidak tigaratus tahun di "sahabati" imperialisme? Ja, djuga kita pertjaja, bahwa kita sekarang ini belum boleh merdeka dan berdiri sendiri

Bahwasanja, memang sudah "makan" sekali injeksian imperialisme itu. Kita kini sangat gampang dilipat-lipat, — "ploobaar" en "gedwee" — "buntutnja tekanan jang berabad-abad", sebagai Schmalhausen mengatakannya. Kita kini sudah 100% mendiadi Rakjat kambing. Kita kini kaum cutus-asa, kita kaum zonder keberibadian. Kita kaum penakut, kita kaum pengetjut. Kita kaum beroch budak, kita banjak jang djadi pendjual bangsa. Kita hilang sama sekali k e l a k i - l a k i a n kita, kita hilang samasekali r a s a - k e m a n u s i a a n kita. Oleh karena itu, djika terus-menerus begitu, kita akan binasa samasekali tersapu dari muka-bumi, dan p a n t a s binasa didalam lumpur perhinaan dan nerakanja kegelapan.

Tetapi Alhamdulillah, di Timur matahari mulai bertjahaja, fadjar mulai menjingsing!

Obat tidur imperialisme jang berabad-abad kita minum, jang telah menjerap didalam darah daging kita dan tulang sumsum kita, ja, jang telah menjerap didalam roch kita dan n j a w a kita, obat tidur itu perlahan-pelelahan mulai kurang dajanja. Semangat-perlawanan jang telah ditidurkan nienjak samasekali, kini mulai sadar dan berbangkit. Semangat perbudakan mulai rontok, dan timbul semi semangat baru jang makin lama makin besar dan bersirung. Bukan semangat jang mengeluh karena tahu akan kerusakan nasib lahir dan nasib bathin; tetapi semangat jang membangkitkan pengetahuan itu mendjadi kemauan berdjombang dan kegiatan berdjombang. Bukan semangat jang menangis, tetapi semangat jang terus menitis mendjadi wil, mendjadi daad. Memang bukan waktunja lagi kita mengeluh; bukan waktunia lagi kita mengaduh, walaupun kerusakan nasib kita itu se-akan-akan memetiahkan kita punjanjawa. Kita tak dapat terlepas dari keadaan sekarang ini dengan mengeluh dan menangis kita h a n j a lah bisa keluar dari padanja dengan bertiantut-tali-wanda, dengan berdjombang, berdjombang dan sekali lagi berdjombang. Kita harus berdjombang habis-habisan tenaga berdjombang walaupun nafas hamoir petiah dari kita punya dada. Kita harus meniru adjaranja itu orang Hindu jang ber-

kata: "Kita sekarang tidak boleh berkesempatan lagi untuk menangis kita sudah kenjang menngis. Bagi kita sekarang ini bukan saatnja bu lembek-lembekan-hati.

Berabad-abad kita sudah lembek hingga mendja seperti kapuk dan aga-agar. Jang dibutuhkan oleh tanah-air kita kini ialah o t o t o t o t j a n k e r a s n j a sebagai badja, urat-ura saraf jang kuatnja sebagai besi k e m a u a n k e r a s n j a sebagai batu-h a m a n j a n g t i a d a barang sesuatu bisa menahann dan jang djika perlu, berani terdjunk d a s a r n j a s a m o d r a !

Alhamdulillah, kini fadjar mulai menjingsing. Pengerahkan memang pasti lahir, pasti h a d u p , pasti kelak membandjir, walaupun oba tidur jang bagaimana djuga mandjurnia, atawa walaupun terang-terangan dirintangi oleh musuh dengan rintangan jang bagaimana djuga, s e l a m a n a s i b k i t a m a s i h j a n g s e n g s a r a . Pergerakan memang bukannya tergantung dari adanja seseorang pemimpin, bukannya bikinannya seseorang pemimpin, pergerakan adalah bikinannya nasib kita jang sengsara. Ia pada h a k e k a t n j a adalah u s a h a m a s j a r a k a s a k i t j a n g m e n g o b a t i d i r i s e d i r i . Ia ada kalau kesakitan masih ada, ia hilang kalau kesakitan sudah hilang. Ia, sebagai katakan oleh seorang pemimpin Djerman didalam dunia jang tak adil ini selalu mengikuti musuhnja sebagai bajangan, jang akhirnya melipus musuhnja itu sehingga mati".

"Tiap-tian makhluk, tiap-tian ummat, tiap-tian bangsa tidak boleh tidak, pasti akhirnya berbandkit, pasti akhirnya berbangun, pasti akhirnya bergerakkan tenagania, diikalaupun ia sudah terlalulalu sekali merasakan tjelakanja diri jang terantania oleh sesuatu daya jang anokaramurka". — begitulah saja pernah menulis. „Diangan lagi manusia, diangan lagi bangsa. — walau tiatinggotentu bergerak berkeluget-keluget kalau merasakan sakit!"

Memang; memang! Pergerakan lahir karena pada hakekatnja dilahirkan oleh t e n a g a t e n a g a p e r g a u l a n - h i d u p sendiri. Pemimpinpun bergera karena hakekatnja tenaga pergaulan-hidup itu membikin ia bergerak. Bukan fadjar meniingsing karena ayam diant berkokok, tetapi ayam-djantan berkokok karena fadjar menjingsing.....

Tetapi bergerak dan bergerak adalah dua. Benar pergerakan itu pada hakekatnja bikinan nasib kita, bikinan masyarakat kita, bikinan n a t u u r , — tetapi n a t u u r sendiri sering-sering terlalu lamba berdjalannya, oleh karena kedjadian-kedjadian atau proses-proses didalam natuur itu sering-sering adalah kedjadian instinct orhewust, ja'ni kedjadian jang „t i d a k i n s i a f". Maka pergerakan kitapun akan terlampau lambat djalannya, per-

akan kitapun akan sebagai orang yang pada lam gelap-gulita zonder obor berdjalan diatas lan ketjil yang banjak batu dan banjak tikungan, gerakan kitapun akan pergerakan instinct" saja, djikalau pergerakan kita itu hanja onbewust as „tidak insjaf”, - yakni suatu pergerakan yang h..... bergerak karena sengsara”, tetapi tidak s j a f d e n g a n t a d j a m akan apa g ditudju dan b a g a i m a n a harus medju. Baru djikalau kita berdjalan membawa o r, mengetahui presis apa yang kita tudju, mengetahui presis dimana letaknja djalan yang ntjang, mengetahui presis segala apa yang akan a djumpai; baru djikalau kita tidak seolah-olan i didalam malam yang gelap-gulita, tetapi seh-olah didalam siang hari yang terang-bende- ng, — baru djikalau sudah demikian itu kita a mentjapai apa yang kita maksud dengan se- ntjang-kentjangnja, selekas-lekasnja, sehatsil- silnja. Oleh karena itulah kita harus mempu- i b e n t u k a n pergerakan yang saksama, o n s t r u k s i pergerakan yang saksama, — ntukan atau kontruksi pergerakan yang harus o t j o k d a n s e s u a i d e n g a n h u- m-h u k u m n j a m a s j a r a k a t d a n r u s m e n u d j u k e a r a h d o e l n j a a s j a r a k a t, yakni masyarakat yang selamat n sempurna.

Dengan bentukan atau konstruksi pergerakan g saksama itu maka pergerakan kita bukan u suatu pergerakan yang onbewust, tetapi su- t pergerakan yang bewust sebewust-bewustnja, a j a f s e i n s j a f - i n s j a f n j a. Dengan ke-bewust-an n keinsjafan yang demikian itu, maka pergera- n kita lalu berarti m e m p e r t j e p a t d j a- n n n j a p r o s e s n a t u u r, suatu per- rakan yang m e m i k u l n a t u u r d a n r p i k u l n a t u u r. Dengan ke-bewust-an a keinsjafan yang demikian itu pergerakan kita ga lalu mendjadi tidak bisa ditundukkan, t i k b i s a d i p a d a m k a n, o n o v e r w i n n e l i j k, — s e b a- i n a t u u r!

ia bisa sebentar dirubuhkan, ia bisa sebentar ubarkan, ia bisa sebentar seolah-olah dihantjur- a, tetapi saban-saban kali ia djuga akan berdiri i dan berdiri lagi, dan madju terus kearah ksudnja. Ia sekali-kali seperti binasa samasekali ena terhantam dengan segala kekuatan duniawi g musuh punja, tetapi kemudian daripada itu och akan muntjul lagi dan berdjalan lagi. Se- ai mempunyai kekuatan rahasia sebagai mem- njai kekuatan penghidup, sebagai mempunyai i-pantjasona” dan ”adji-tjandabirawa”, maka gerakan yang m e m i k u l n a t u u r d a n t e r- k u l n a t u u r itu tak bisa dibunuh, dan mala- ia makin lama makin membandjir. Sebagai uur sendiri, ia tidak boleh tidak p a s t i d a t a n g la maksudnja!

Oleh karena itu, kaum Marhaen, besarkanlah i mu, besarkanlah ketetapan tekadmu, besar- lah kepertjajaanmu akan tertjapainja kamu nja tjita-tjita. Bukan hanja suatu peribahasa

sahadja, kalau saja mengatakan fadjar telah me- njingsing. Pergerakan kita sudah mulai berbentuk, emoh akan haluan yang hanja ”tjita-tjita” sahadja. Pergerakan kita itu sudah mulai djadi pergerakan sebagai yang saja maksudkan diatas tahadi. Garis- garis besar dari bentukan atau konstruksi itu kini terletak dihadapanmu, tergurat didalam risalah yang ketjil ini. Batjalah risalah ini dengan teliti dan seksama, simpanlah segala adjaran-adjarannja didalam fikiran dan kalbumu, kerdjakanlah se- gala adjaran-adjaran itu dengan ketetapan hati dan ketabahan tekad. Haibatkanlah pergerakan- mu mendjadi pergerakan yang b e w u s t d a n i n s j a f, yang karenanja akan mendjadi haibat sebagai tenaganja gempa.

Fadjar mulai menjingsing. Sambutlah fadjar itu dengan kesadaran, dan kamu akan segera melihat matahari terbit.

5. GUNANJA ADA PARTAI

Kita bergerak karena kesengsaraan kita, kita bergerak karena ingin hidup yang lebih lajak an sempurna. Kita bergerak udak karena ”ideal” sahadja, kita bergerak karena ingin tjukup ma- kanan, ingin tjukup pakaian, ingin tjukup tanah, ingin tjukup perumahan, ingin tjukup pendidikan, ingin tjukup minimum seni dan c u u u r, - p e n d e k k a t a k i t a b e r g e r a k k a r e n a i n g i n p e r b a i k a n n a s i b d i d a l a m s e g a l a b a g i a n - b a g i a n d a n t j a b a n g - t j a b a n g n j a.

Perbaikan nasib ini hanjalah bisa datang seratus prosen, bilamana masyarakat sudah tidak ada ka- pitalisme dan imperialisme. Sebab stelsel inilah yang sebagai kemadean tumbuh diatas tubuh kita, hidup dan subur daripada kita, hidup dan subur daripada tenaga kita, rezeki kita, zat-zatnja masja- rakat kita.

Oleh karena itu, maka pergerakan kita dja- nganlah pergerakan yang ketjil-ketjilan; pergera- kan kita itu haruslah pada hakekatnja suatu per- gerakan yang ingin merobah samasekali sifatnja masyarakat suatu pergerakan yang ingin mendje- bol kesakitan-kesakitan masyarakat sampai kesu- lur-sulurnja dan akar-akarnja, suatu pergerakan yang samasekali ingin m e n g g u g u r k a n s t e l s e l i m p e r i a l i s m e d a n k a p i t a l i s m e. Pergerakan kita djanganlah hanja suatu pergerakan yang ingin rendahnja padjak, djangan- lah hanja ingin tambahnja upah, djanganlah hanja ingin perbaikan-perbaikan ketjil yang bisa tertjapai hari-sekarang,-tetapi ia harus me- nudju kepada suatu transformatie yang mendjung- kir-balikkan samasekali sitatnja masyarakat itu, dari sifat imperialistis-kapitalistis mendjadi sifat yang sama-rasa-sama-rata. Pergerakan kita harus- lah dus suatu pergerakan yang pada hakekatnja menudju kepada suatu ”ommekeer” susunan sosial.

Bagaimana ”ommekeer” susunan sosial bisa terdjadi? Pertama-tama oleh kemauannja dan tenaganja masyarakat sendiri, oleh ”immanente

krachten" masyarakat sendiri, oleh "kekuatan-kekuatan rahasia" daripada masyarakat sendiri. Tetapi tertampak-keluarnya, lahirnja, djasmaninja, oleh suatu pergerakan Rakjat-djelata yang radikal, ja'ni oleh massa aksi. Tidak ada suatu perubahan besar didalam riwayat-dunia yang achir-achir ini, yang lahirnja tidak karena massa-aksi. Tidak ada transformatie dizaman achir-achir ini, yang zonder massa-aksi. Massa-aksi adalah senantiasa menjadi penghantar pada saat masyarakat-tua melangkah kedalam masyarakat yang baru. Massa-aksi adalah senantiasa menjadi paradj¹⁾ pada saat masyarakat-tua yang hamil itu melahirkan masyarakat yang baru. Perubahan didalam zaman Chartisme di Inggris didalam zaman yang lalu perubahan rubuhnja feodalisme di Perantjis diganti dengan stelsel burgerlijke democratie, perubahan-perubahan matinja feodalisme didalam negeri-negeri Eropah yang lain, perubahan-perubahan rontoknja stelsel kapitalisme bagian perbagian sesudah pergerakan proletar mendjelma didunia, — perubahan-perubahan itu semuanya adalah "diparadj¹⁾" oleh massa-aksi yang membangkitkan sap-sapan dari pada Rakjat. Perubahan-perubahan itu dibarengi dengan gemuruhnja bandjir pergerakan Rakjat-djelata.

Maka kitapun, bilamana kita ingin mendatangkan perubahan yang begitu maha-besar didalam masyarakat sebagai gugurnja stelsel imperialisme dan kapitalisme, kita pun harus bermas-aksi. Kita pun harus menggerakkan Rakjat-djelata didalam suatu pergerakan radikal yang bergelombang sebagai bandjir, mendjelmakan pergerakan massa yang tahadinja onbewust dan hanja raba-raba itu menjadi suatu pergerakan massa yang bewust dan radikal, ja'ni massa-aksi yang insjaf akan djalan dan maksud-maksudnja. Sebab, massa-aksi bukanlah sembarang pergerakan massa, bukanlah sembarang pergerakan yang orangnja ribuan atau bermiljunan. Massa-aksi adalah pergerakan massa yang radikal. Dan Massa-aksi yang manfaat seratus prosen hanjalah massa-aksi yang bewust dan insjaf; oleh karena itu maka-massa-aksi yang manfaat adalah dus: suatu pergerakan Rakjat-djelata yang bewust dan radikal.

Welnu, bagaimanakah kita bisa mendjelmakan pergerakan yang onbewust dan ragu-ragu dan raba-raba menjadi pergerakan yang bewust dan radikal? Dengan suatu partai! Dengan suatu partai yang mendidik Rakjat-djelata itu kedalam ke-bewust-an dan keradikalan. Dengan suatu partai, yang menuntun Rakjat-djelata itu didalam perdjalanannja kearah kemenangan, mengolah tenaga Rakjat-djelata itu didalam perdjjoangannja sehari-hari, — menjadi pelopor daripada Rakjat-djelata itu didalam menudju kepada maksud dan tjita-tjita.

Partailah yang memegang obor, partailah yang berdjalan, dimuka, partailah yang menjuluhi dja-

lan yang gelap dan penuh dengan randjau-randjau itu sehingga menjadi djalan terang. Partailah yang memimpin massa itu didalam perdjjoangan merebahkan musuh, partailah yang memegang komando daripada barisan massa. Partailah yang harus memberi ke-bewust-an pada pergerakan massa, memberi kesedaran, memberi keadikalan.

Oleh karena itu maka partai sendiri lebih dari harus partai yang bewust, partai yang sedar, partai yang radikal. Hanja partai yang bewust dan sedar dan radikal bisa membikin massa menjadi bewust dan sedar dan radikal. Hanja partai yang demikian itu bisa menjadi pelopor yang sedjati didalam pergerakan massa, dan membawa massa itu dengan selekas-lekasnja kearah kemenangan dan keunggulan. Hanja partai yang demikian itu bisa membikin massa-aksi yang bewust, massa-aksi yang dus dengan tjepuk bisa mengundurkan stelsel yang menjadi buru perlawanannja.

Orang sering mengira: kita barulah bisa menang kalau Rakjat Indonesia yang 60.000.000 jiwa ini semuanya sudah masuk suatu partai! Pengira yang demikian itu adalah pengalamunan yang kosong, pengalamunan yang mustahil, pengalamunan yang memang tidak perlu terdjadi. Djikalau kemenangan baru bisa datang bilamana Rakjat Indonesia yang 60.000.000 itu semuanya sudah masuk suatu partai, maka sampai lebur-kiamat pun belum bisa menang. Sebab Rakjat yang 60.000.000 itu tidak bisa semuanya menjadi anggauta partai, mustahil semuanya bisa menjadi anggauta partai.

Tidak! Kemenangan tidak usah menunggu sampai semua Rakjat-djelata setjindil-abang masuk suatu partai! Kemenangan sudah bisa datang, bilamana ada satu partai yang gagah-berani dan bewust menjadi pelopor-sedjati daripada massa, yang bisa memimpin dan bisa menggerakkan massa, yang bisa berdjoang dan menaruh berdjoang kepada massa, yang perkataannya menjadi undang-undang bagi massa dan perahatnja menjadi komando bagi massa. Kemenangan sudah bisa datang, bilamana ada satu partai yang dengan gagah-berani pandai memimpin dan membangkitkan bewuste massa-aksi!

Lihatlah mitsalnja perdjjoangan di Tiongkok dulu, lihatlah pergerakan di Mesir sepuluh-limabelas tahun yang lalu, lihatlah pergerakan kaum proletar di Eropah. Disemua negeri itu pergerakan tidak berwujud "tiap-tiap hidung menjadi anggauta", tetapi adalah satu partai-pelopor yang berdjalan dimuka memanggul bendera: Mesir dulu partai Wafd, di Tiongkok dulu partai Kou Min Tang, didalam pergerakan kaum proletar De Internationale. Partai-pelopor inilah yang menjadi motornja dan pengolahnja massa, kampiunnja massa, komandannja massa. Partai-partai-pelopor inilah yang mengemudikan massa-aksi.

1) Paradj - bahasa Sunda Artinja dukun beranak.

Oleh karenanja, buanglah djauh-djauh itu pe-giraan salah, bahwa lebih dulu "tiap-tiap hidung harus mendjadi anggauta"! Tidak, bukan lebih dulu "tiap-tiap hidung harus mendjadi anggauta", bukan lebih dulu semua Rakjat-djelata setjindil-bangnja harus memasuki partai, tetapi Marhaen-Marhaen jang paling bewust an sadar dan radikal harus menggabungkan diri didalam suatu partai-pelopor jang gagah-erani! Marhaen-Marhaen jang paling bersemangat, Marhaen-Marhaen jang paling berkemauan, paling sadar, paling radjin, paling berani, paling keras-hati,- Marhaen-Marhaen itulah sudah tju-up untuk menggerakkan massa-aksi jang haibat an bergelora dan jang datang pada kemenagan, asal sahadjja tergabung didalam satu partai-pelopor jang tahu menggembangkan semua enaganja massa.

Satu partai-pelopor? Ja, satu partai-pelopor, dan tidak dua, tidak tiga! Satu partai sahadjja jang bisa paling baik dan paling sempurna,- jang lain lain tentu kurang baik dan kurang sempurna. Satu partai sahadjja jang bisa mendjadi elopor!

Memang: lebih dari satu pelopor, membingungkan massa; lebih dari satu komandan, mengatjau-an tentara. Riwayat-duniapun menundjukkan bahwa didalam tiap-tiap massa-aksi jang haibat adalah hanya satu partai sahadjja jang mendjadi pelopor berdjalan dimuka sambil menanggul bendera. Bisa ada partai lain-lain, bisa ada perkumpulan lain-lain, tetapi partai-partai jang lain itu pada saat-saat jang penting hanjalah membuntut sahadjja pada partai-pelopor,- ikut berdjoang, ikut memimpin, tetapi tidak sebagai komandan seluruh tentaranja massa, melainkan hanya sebagai sersan-sersan dan kopal-kopral sahadjja. Pada saat "historische momen-en" maka menurut riwayat-dunia adalah satu partai jang dianggap oleh massa "itulah laki-laki dunia, marilah mengikut laki-laki dunia itu"!

Tetapi partai mana jang bisa mendjadi partai-partai-pelopor didalam massa-aksi kita? Partai jang kemauannja tjotjok dengan kemauan Marhaen, partai jang selalagalanja tjotjok dengan keakuan natuur, partai jang memikul natuur dan terpikul natuur. Partai jang demikian itulah jang bisa mendjadi komandannja massa-aksi kita. Bukan partai burjuis bukan partai ningrat, bukan "partai-Marhaen" jang reformistis, bukanpun "partai radikal" jang hanya amuk-amukan sahadjja,- tetapi partai Marhaen jang radikal jang tahu saat mendjatuhkan pukulan-pukulannja. Seorang pemimpin kaum buruh pernah berkata: "Partai ta' boleh ditinggalan oleh massa; massa selamanja radikal; partai harus radikal pula. Tetapi partai tidak oleh pula mengira, bahwa ia dengan anarcho-syndicalisme¹⁾ lantas mendjadi pemimpin massa.

1) Haluan "amuk-amukan".

Partai harus memerangi dua haluan: berdjoang memerangi haluan reformis, dan berdjoang memerangi haluan anarcho-syndicalist".

Welnu, partai jang digambarkan oleh pemimpin inilah,- jang dus tidak lembek, tetapi djuga tidak amuk-amukkan sahadjja, melainkan konsekwen-radikal jang berdisiplin,- partai jang demikian itulah jang bisa mendjadi partai-pelopor. Masyarakat sendiri akan mendjatuhkan hukuman atas partai-partai jang tidak demikian: mereka akan didorong olehnja kebelakang mendjadi paling mudjur "partai-sersan" sahadjja, atau akan disapu olehnja samasekali, lenjap dari muka-bumi. Oleh karenanja, Marhaen, awas! Awaslah didalam memilih partai. Pilihlah hanya itu partai sahadjja, jang memenuhi sjarat-sjarat jang saja sebutkan tahadi!

Partai jang demikian itulah jang menuntun pergerakan Rakjat-djelata, merobah pergerakan Rakjat-djelata itu dari onbewust mendjadi bewust, memberikan pada Rakjat-djelata bentuk an alias konstruksi daripada pergerakannja, membikin terang pada Rakjat-djelata apa jang ditudju dan bagaimana harus menudju, mendjelmakan pergerakan Rakjat-djelata jang tahadinja hanya ragu-ragu dan raba-raba sahadjja mendjadi suatu massa-aksi jang bewust dan insjaf, — suatu massa-aksi, jang oleh karenanja, segera memetik kemenagan.

Partai jang demikian itulah partai jang dibutuhkan oleh kaum Marhaen!

6. INDONESIA-MERDEKA SUATU DJEMBATAN

Bentukan alias konstruksi! Bentukan jang pertama ialah, sebagai sudah saja kemukakan, bahwa maksud pergerakan kita haruslah: suatu masyarakat jang adil dan sempurna, jang tidak ada tindasan dan hisapan, jang tidak ada kapitalisme dan imperialisme. Kita bergerak,- begitulah tahadi djuga sudah saja katakan,- tidak karena "ideal" jang ngalamun, tetapi karena kita ingin perbaikan nasib. Kita bergerak karena kita tidak sudi kepada stelsel kapitalisme dan imperialisme, jang membikin kita papa dan membikin segundukan manusia tenggelam dalam kekajaan dan harta, dan karena kita ingin sama-rata merasakan lezatnja buah-buah dari kitapunja masyarakat sendiri. Kita, oleh karenanja, harus bergerak untuk menggugurkan stelsel kapitalisme dan imperialisme!

Dan sjarat jang pertama untuk menggugurkan stelsel kapitalisme dan imperialisme? Sjarat jang pertama ialah: kita harus merdeka. Kita harus merdeka agar supaja kita bisa leluasa bertjantjut-taliwanda menggugurkan stelsel kapitalisme dan imperialisme. Kita harus merdeka, agar supaja kita bisa leluasa mendirikan suatu masyarakat-baru jang tiada kapitalisme dan im-

perialisme. Selama kita belum merdeka, selama kita belum bisa leluasa menggerakkan kita punja badan, kitapunja tangan, kitapunja kaki, selama kita dus masih terhalang didalam segala kitapunja gerak-bangkit,- tidak bisa "kiprah" sehaibat-haibatnja,- selama itu maka kita tidak bisa habis-habisan-tenaga menghandjut stelsel kapitalisme dan imperialisme. Selama itu maka kapitalisme dan imperialisme akan tetap sebagai raksasa jang maha-shakti bertachta diatas singgasana kerezekian Indonesia, tidak bisa digugurkan daripada singgasana itu hingga mati menggigit debu. Dapatkah Ramawidjaja mengalahkan Rahnawa Dasamuka, djikalau Ramawidjaja itu mitsalnja terikat kaki dan tangannja, ta' dapat mementangkan iapunja djemparing dan ta' dapat melepaskan iapunja sendjata ?

Rakjat jang tidak merdeka adalah Rakjat jang sesungguh-sungguhnja tidak-merdeka. Segala gerak-bangkitnja adalah tidak-merdeka. Segala kemauannja, segala fikirannja, ja segala Rochuja dan Njawanja adalah tidak-merdeka. Mau ini tidak leluasa, mau itu tidak leluasa. Mau ini ada randjau, mau itu ada djurang. Mau mengeluarkan kritik, ada artikel 154 sampai 157 dari buku hukum siksa; mau mengandjurkan kemerdekaan, ada artikel 153 bister; mau menggerakkan kaum buruh, terantjam artikel 161 bis; mau mengadakan aksi radikal, gampang ditjap "berbahaja bagi keamanan umum"; mau memadjukan perniagaan ada rintangan bea, mau memadjukan sosial ada matjam-matjam "sjarat",- pendek kata : mau ini ada duri, mau itu ada paku.

Oleh karena itu, maka kemerdekaan adalah s j a r a t jang maha penting untuk menghilangkan kapitalisme dan imperialisme, s j a r a t jang penting untuk mendirikan masyarakat jang sempurna. Gedung Indonesia Sempurna, dimana semua Rakjat-djelata bisa bernaung dan menjimpan dan memakan segala buah-buah kerezekian dan ke-kulturan sendiri, dimana tidak ada kepapa-sengsaraan pada satu fihak dan keradja-beranaan pada lain fihak, Gedung Indonesia Sempurna itu hanjalah bisa didirikan diatas buminja Indonesia jang Merdeka. Gedung Indonesia Sempurna itu hanjalah bisa didirikan djikalau pandemen-pandemennja tertanam didalam tanahnja Indonesia jang Merdeka.

Tetapi, Gedung Indonesia Sempurna itu djuga hanjalah bisa didirikan oleh Marhaen Indonesia, bilamana M a r h a e n adalah l e l u a s a mendirikannja,- tidak terikat oleh ini, tidak terikat oleh itu,- ja'ni bilamana M a r h a e n, dan tidak fihak lain, mempunjai kemerdekaan gerak-bangkit jang ta' terhalang-halang. Oleh karena itu, maka Marhaen tidak sahadja harus mengichtiarkan Indonesia Merdeka, tidak sahadja harus mengichtiarkan kemerdekaan-nasional, tetapi djuga harus mendjaga jang didalam kemerdekaan-nasional itu kaum Marhaenlah jang memegang kekuasaan,- dan bukan kaum burdjuis Indo-

nesia, bukan kaum ningrat Indonesia, bukan kaum musuh-Marhaen bangsa Indonesia jang lain-lain. Kaum Marhaenlah jang didalam Indonesia Merdeka itu harus memegang teguh-teguh politieke macht, djangan sampai bisa direbut oleh lain-lain golongan bangsa Indonesia jang musuh kaum Marhaen.

Lihatlah kenegeri Belanda, lihatlah kenegeri Perantjis. Lihatlah kenegeri Djerman, Inggris, Amerika, Italia dan lain-lain. Semua negeri-negeri itu adalah negeri jang merdeka, semua negeri-negeri itu adalah berkemerdekaan nasional. Semua negeri-negeri itu adalah bebas dari pemerintahan asing. Tetapi tidakkah kaum Marhaen dinegeri-negeri itu berat sekali perdjoangannja inggugurkan kapitalisme, tidakkah kaum Marhaen dinegeri-negeri itu maha-sukar sekali usannja mendongkel akar-akarnja kapitalisme,- tidakkah kaum Marhaen disitu sudah hampir satu abad boleh dikatakan sia-sia bermandi keringat, ja kadang-kadang bermandi darah, ingin mendjebok kapitalisme jang menjengsarakan mereka ? Tidakkah kaum Marhaen disitu sampai kini masih bongkok, punggungnja diduduki oleh kapitalisme jang mengikel-ingkel mereka, mengetrog-entrog mereka, memperbudakkan mereka,- memperbinatangkan mereka sampai kedaras-dasarannja neraka kesengsaraan dan neraka-kelaparan ?

Apakah sebabnja begitu ? Sebabnja ialah, bahwa kaum Marhaen dinegeri-negeri itu sampai kini belum memegang politieke macht, belum memegang kekuasaan negeri, belum memegang kekuasaan pemerintah. Politieke macht sampai kini adalah didalam tangannja kaum kapitalisme sendiri, didalam tangannja kaum burdjuis sendiri, didalam tangannja djustru itu kaum jang mendjadi tulang punggungnja stelsel jang mereka lawan itu. Segenap apparatnja politieke macht itu adalah dipakai sendjata oleh kaum burdjuis untuk memagari stelsel kapitalisme dan untuk menghantam aksinja kaum Marhaen jang mau meruntuhkan kapitalisme. Bandjirnja pergerakan kaum Marhaen itu saban-saban mendjadi uablah samasekali karena panasnja angin-simula jang keluar dari politieke machtnja kaum burdjuis. Maka oleh karena itulah, sembojan pergerakan-radikal daripada kaum Marhaen dinegeri-negeri itu kini adalah : "naar de politieke macht!", "kearah kekuasaan-pemerintahan". Kekuasaan-pemerintahan itulah jang kini lebih dulu mau mereka kedjar, kekuasaan-pemerintahan itulah jang kini lebih dulu mau mereka rebut dari tangannja kaum burdjuis. Dengan kekuasaan-pemerintahan didalam tangan sendiri, dengan sendjata-pamungka didalam tangan sendiri, maka kaum Marhaen Eropah akan gampang membinasakan stelsel kapitalisme, memelantingkan kapitalisme dari pundaknja jang telah berabad-abad diperkudakan itu. Kaum burdjuis jang tangannja hampa, — jang politieke machtnja direbut oleh kaum Marhaen Eropah,- kaum burdjuis jang demikian itu akan mendjadi seperti singa jang hilang giginja dan

lang kukunja, hilang guruhnja dan hilang perawanja, hilang tenaganja dan hilang kuasanja, lemah, lemas, dan mati semua kutu-kutunja, - ta' kuasa sedikit djuapun melindungi dan memperhankan stelsel kapitalisme jang mereka sembahkan mereka pudja!

Nah, kaum Marhaen Indonesia pun, oleh kanaanja, harus insjaf, bahwa merekapunja perjoangan akan ta' perlu mereka berpandjangan, kalau pada saat datangnya Indonesia Merdeka itu politieke macht djatuh kedalam tangannya kaum burdjuis atau kaum ningrat Indonesia. Kaum Marhaen Indonesia pun harus insjaf, bahwa mereka harus bisa segera mendjatuhkan stelsel kapitalisme dan imperialisme, hanja djikalau pada saat datangnya bendera kemerdekaan nasional, mereka lah jang menerima warisan politieke macht dari overheersing asing. Kaum Marhaen Indonesia pun dus harus mendjaga, djangan sampai politieke macht itu djatuh kedalam tangannya fihak burdjuis dan ningrat Indonesia.

Mendjadi: mereka harus membanting-tulang mendatangkan kemerdekaan-nasional, membanting-tulang mendjelmakan kemerdekaan negeri Indonesia, tetapi dalam pada membanting-tulang mendatangkan kemerdekaan negeri Indonesia itu, mereka harus awas dan sekali lagi awas, djangan sampai gedung jang mereka didatangi itu kaum burdjuis atau ningratlah jang memusukinja. Dalam pada berdjoang habis-habisan mendatangkan Indonesia Merdeka itu, kaum Marhaen harus mendjaga, djangan sampai nanti mereka jang "kena getah", tetapi kaum burdjuis atau ningrat jang "memakan nangkanya".

O, memang, pekerjaan-berat mendatangkan Indonesia Merdeka buat sebagian besar hanja kaum Marhaenlah jang bisa melaksanakan, pekerjaan-berat itu buat sebagian besar hanja kaum Rakjat-djelatalah jang bisa menjelesaikan. Pekerjaan-berat itu memang adalah merekapunja "pekerjaan-riwajat", merekapunja "kewajiban-riwajat", merekapunja "bagian-riwajat". Pekerjaan-berat itu memang merekapunja "historische taak". Memang diatas sudah saja dikatakan, bahwa semua perobahan-perobahan-besar dalam riwayat-dunia jang achir-achir ini adalah ditantarkan oleh massa-aksi, diparadjikan oleh massa-aksi, - artinja: diparadjikan oleh aksinja "Rakjat-djelata jang berkobar-kobaran sangat menjundul langit. Tetapi riwayat-dunia telah memberi tjontoh-tjontoh, - mitsalnja di negeri Perantjis, - bahwa Rakjat-djelata itu, karena kurang awasnja, kurang bewust, kurang pimpinannya suatu partai "Rakjat-djelata jang sedjati, achirnja mereka mele mendjadi "pengupas nangka" belaka, jang kena getah, tetapi tidak ikut merasakan nangkanya". Moga-moga Rakjat-djelata Indonesia djangan sampai menambah tjontoh-tjontohnya riwayat-dunia itu dengan satu tjontoh lagi jang baru! Moga-moga Rakjat-djelata Indonesia dus selamanya awas, awas, dan sekali lagi awas!

Klassenstrijd? Adakah dus saja kini mengutamakan klassenstrijd? Saja belum mengutamakan klassenstrijd antara bangsa Indonesia dengan bangsa Indonesia, walaupun tiap-tiap nafsu kemodalan dikalangan bangsa sendiri kini sudah saja musuhi. Saja seorang nasionalis, jang selamanya buat mentjapai Indonesia Merdeka memusatkan perjoangan kita didalam perjoangan nasional. Saja selamanya mengandjurkan, supaya semua tenaga nasional jang bisa dipakai menghantam musuh untuk mendatangkan kemerdekaan-nasional itu, haruslah dihantamkan pula. "Desociale tegenstellingen worden in onvrije landen in nationale vormen uitgevochten", "pertentangan sosial dinegeri-negeri jang ta' merdeka diperdjouangkan setjara nasional", begitulah djuga Henriette Roland Holst berkata. Tetapi kemerdekaan-nasional hanjaiah suatu djembatan, suatu sjarat, suatu strijdmoment Dibelakang Indonesia Merdeka itu kita kaum Marhaen masih harus mendirikan kita-punja Gedung Keselamatan, bebas dari tiap-tiap matajam kapitalisme. Oleh karena itu, maka apa jang saja tuliskan diatas, adalah berarti mengandjurkan supaya Marhaen awas. Saja mengandjurkan djangan sampai Marhaen nanti mendjadi "pengupas nangka", jang hanja mendapat bagian getahnya sahadjia. Saja mengandjurkan supaya buah politieke macht, jang dengan habis-habisan-tenaga terutama oleh Marhaen dipetiknja, djuga nanti oleh Marhaen dipegangnja dan dimakannya. Saja seorang nasionalis, tetapi seorang nasionalis Marhaen, jang hidup dengan kaum Marhaen, mati dengan kaum Marhaen.

Nah, saja dus bisa menutup bagian 6 dari tulisan ini dengan mengulangi apa sarinja. Mengulangi:

bahwa pertama tudjuannya pergerakan Marhaen haruslah suatu masyarakat zonder kapitalisme dan imperialisme,

bahwa kedua djembatan kearah masyarakat itu adalah kemerdekaan negeri Indonesia,

bahwa ketiga Marhaen harus mendjaga, jang didalam Indonesia Merdeka itu Marhaenlah jang menggenggam politieke macht, menggenggam kekuasaan-pemerintahan.

Inilah bentukan-bentukan dari kitapunja pergerakan, jang harus sangat kita perhatikan.

7. SANA MAU KESANA SINI MAU KESINI.

Tetapi sekarang timbul pertanyaan: baga mana kita melaksanakan, mendjelmakan, merealisasikan tiga bentukan itu? Baga mana kita mendatangkan masyarakat jang bebas dari kapitalisme-imperialisme, bagaimana kita jang mewaris politieke macht, bagaimana, lebih dulu, kita mentjapai Indonesia Merdeka?

Untuk bisa mentjapai Indonesia Merdeka, kita lebih dulu harus mengetahui hakekatnja kedudukan antara imperialisme dan kita, hakekat kedudukan antara sana dan sini. Hakekat kedudukan

kan sana-sini itulah nanti jang menentukan azas-azas-perdjoangan kita, azas-azas-sepak-terdjang kita, azas-azas-strategi kita, azas-azas-taktik kita. Hakekat kedudukan itulah jang nanti harus menentukan „houding” kita terhadap pada kaum sana itu adanja.

Bagaimana hakekat kedudukan itu? Hakekat kedudukan itu boleh kita gambarkan dengan satu perkataan sahadja: pertentangan. Pertentangan didalam segala hal. Pertentangan asal, pertentangan tudjuan, pertentangan kebutuhan, pertentangan sifat, pertentangan hakekat. Tidak ada perbarengan, tidak ada persamaan sedikitpun antara sana dan sini. Tidak ada persesuaian antara sana dan sini. Antara sana dan sini ada pertentangan sebagai api dan air, sebagai serigala dan rusa, sebagai kedjahatan dan kebenaran.

Memang riwayat-dunia selamanja menundjukkan pertentangan antara dua golongan. Memang riwayat-dunia selamanja menundjukkan adanja suatu golongan „atas” dan adanja suatu golongan „bawah”, jang bertentangan satu sama lain, berantitese satu sama lain: dizaman feodal golongan ningrat dengan golongan „kawulo”, dizaman kapitalisme golongan kemodalan dengan golongan proletar, dizaman kolonial golongan sipendjadjah dengan golongan siterdjadjah. Maka antitese alias pertentangan jang belakangan inilah jang menguasai segenap sifat hakekatnja perhubungan antara sana dan sini, segenap „wezen-nja” perhubungan antara sana dan sini, sehingga sana dan sini selamanja adalah ketabrakan satu sama lain. Antitese inilah jang oleh kaum Marxis disebutkan dialektik-nja sesuatu keadaan, dialektik-nja sesuatu bagian dari pada riwayat dialektik-nja sesuatu bagian didalam gerak-bangkitnja alam.

Maka oleh karena itu buta dan djustalah tiap-tiap orang jang mau memungkiri atau menutupi antitese itu, buta dan djusta djugalah tiap-tiap siapa sahadja jang mau menipiskan pertentangan antara dua pihak itu. Buta dan djustalah siapa sahadja jang mau „mengakurkan” pihak sana dengan pihak sini. Tidak! Sana dan sini tidak bisa diakurkan, sana dan sini tidak bisa dipungkiri atau ditipiskan antitesenja, — sana dan sini walau sampai kezaman kiamatpun akan selamanja berhadap-hadapan satu sama lain sebagai singa dengan mangsanja. Sana dan sini akan selamanja bertabrak-tabrakan satu sama lain, berantitese satu sama lain, sehingga achirnja sana hilang dari hadapan sini samasekali.

Tidakah sana senang akan terusnja pendjadjahan Indonesia sampai kezaman achirnja alam, tidakkah sana senang akan terusnja ketjakrawartian diatas semua bagian daripada masyarakat Indonesia, tidakkah sana hidup djustru daripada sini? Tidakkah sebaliknya sini mau selekas-lekasnja merdeka, tidakkah sini mau selekas-lekasnja menjakrawati masyarakat sendiri?

Buta, sekali lagi butalah siapa sahadja jang mau memungkiri adanja pertentangan ini, tabrakan ini, antitese ini, — jang memang sudah korena dialektiknja alam. Tetapi kita, jang djustru membentuk pergerakan jang memikul atar dan terpikul alam, memikul natuur dan terpikul natuur, kita jang tidak ma buta, harus djustru mengambill antitese ini sebagai uger-ugernja semua kitapunja azas perdjoangan dan semua kitapunja taktik. Kita harus djustru mengalaskan segala kitapunja sepak-terdjang dan dialektik ini, mengalaskan segala kitapunja „houding” diatas dialektik ini. Kita harus dengan sekelebatan mata sahadja sudah mengerti bahwa dialektik ini adalah menjuruh kita selamanja ingkar daripada kaum sana itu, tidak berkerdja bersama-sama dengan kaum sana itu, sebaliknya mengadakan perlawanan zonder damai terhadap pada kaum sana itu — sampai kepada saat keunggulan dan kemenangan. Kita harus dengan sekelebatan mata sahadja mengerti, bahwa oleh adanja antitese ini kemenangan hanjalah bisa kita tjapai dengan kebiasaan sendiri, tenaga sendiri, usaha sendiri, kepandaian sendiri, keringat sendiri, fi'il-fi'il keberanian sendiri.

Inilah jang biasanja kita sebutkan politik „politik tjaja pada kekuatan sendiri”, politik „self-help dan non-cooperation”: politik menjusun kitapunja masyarakat setjara positif dengan tenaga dan usaha sendiri, politik tidak mau bekerdja bersama-sama dengan kaum sana diatas semua lapangan perdjoangan politik, politik memboikot dewan-dewan kaum sana, baik jang ada disini maupun jang ada dinegerinja kaum sana sendiri. Tentang politik ini tempo hari saja pernah menulis :

„Non-kooperasi adalah salah satu azas perdjoangan (strijdbeginsel) kita untuk mentjapai Indonesia Merdeka. Didalam perdjoangan mengedja Indonesia Merdeka itu kita harus senantiasa ingat, bahwa adalah pertentangan kebutuhan antara sana dan sini, antara kaum jang mendjadjah dan kaum jang didjadjah, antara overheerser dan overheerste. Memang pertentangan kebutuhan inilah jang mendjadi sebabnja kitapunja non-kooperasi. Memang pertentangan kebutuhan inilah jang memberi kejakinan kepada kita, bahwa Indonesia Merdeka tidaklah bisa tertjapai, djikalau kita tidak mendjalankan politik non-kooperasi. Memang pertentangan kebutuhan inilah jang membuat sebagian besar menetapkan kitapunja azas-azas-perdjoangan jang lain-lain, mitsalnja machtsvorming, massa-aksi, dan lain-lain.

Oleh karena itulah, maka non-kooperasi bukannya hanja suatu azas perdjoangan „tidak duduk didalam raad raad pertuanan” sahadja. Non-kooperasi adalah suatu actief beginsel, tidak mau bekerdja

bersama-sama diatas segala lapang politik dengan kaum pertuanan, melainkan mengadakan suatu perdjoangan jang ta' kenal damai, suatu onverbidde lijkestrijd dengan kaum pertuanan itu.

Non-kooperasi t'dak berhenti diluar dinding-dindingnja raad-raad sahadja, tetapi non-kooperasi adalah meliputi semua bagian-bagian daripada kitapunja perdjoangan pol.tik. Itulah sepabnja, maka non-kooperasi adalah ber-tipe radikalisme, impliceren radikalisme, — radikalisme hati, radikalisme fikiran, radikalisme sepak-terdjang, radikalisme d'dalam semua innerlijke dan uiterlijke houding. Non-kooperasi meminta kegiatan, meminta radicale activiteit. 1).

Salah satu bagian daripada kitapunja non-kooperasi adalah tidak mau duduk didalam dewan-dewan kaum pertuanan. Sekarang apakah Tweede Kamer djuga termasuk dalam dewan-dewan kaum pertuanan itu? Tweede Kamer adalah termasuk dalam dewan-dewan kaum pertuanan itu. Sebab djustru Tweede Kamer itu bagi kita adalah suatu „belichaming”, suatu „pembadanan”, suatu „pendjelmaan” daripada koloniserend Holland, suatu „pendjelmaan” daripada kekuasaan atau macht jang mengungkung kita menjadi Rakjat jang ta' merdeka. Djustru Tweede Kamer itu adalah suatu „symbool” daripada koloniserend Holland, suatu „symbool daripada keadaan jang menekan kita menjadi Rakjat taklukan dan sengsara. Oleh karena itulah maka non-kooperasi kita sudah didalam azasnja harus tentu-tentu djuga kepada Tweede Kamer chusussnja dan Staten General umumnja, -ja, harus ditudjukan djuga kepada semua „belichaming-bel chaming” sein daripada sesuatu sistim jang buat mengungkung kita dan bangsa Azia, mitsalnja Volkenbond dan lain sebagainya.

Anarchisme? Toch Tweede Kamer suatu parlemen? Memang, Tweede Kamer adalah suatu parlemen; tetapi Tweede Kamer adalah suatu parlemen Belanda. Memang kita adalah orang anarchis, kalau kita menolak segala keparlemenan. Memang kita orang anarchis, kalau mitsalnja nanti kita menolak duduk didalam parlemen Indonesia, jang nota bene hanya bisa berada didalam suatu Indonesia jang Merdeka, dan jang akan memberi djalan kepada demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Mamang! Djikalau seorang Inggeris memboikot parlemen Inggeris, djikalau seorang Djerman t'dak sudi duduk dalam parlemen Djerman, djikalau seorang Perantjis menolak kursi dalam parlemen Perantjis,

1) Tidak semua orang jang tidak duduk dalam raad atau tidak kerdja pada gupermen (mitsalnja tukang soto), ada orang "non".

maka ia boleh djadi seorang anarchis. Tetapi djikalau seandainja mereka menolak duduk didalam suatu parlemen daripada suatu negeri jang mengungkung negeri mereka, — djikalau kita bangsa Indonesia sudah didalam azasnja menolak duduk dalam parlemen Belanda-, maka itu bukanlah anarchisme, tetapi suatu azas perdjoangan nasionalis-non-koperator jang sesehat-sehatnja!

Lihatlah riwayat perdjoangan non-kooperasi dinegeri-negeri lain. Lihatlah mitsalnja riwayat non-kooperasi dinegeri Ierlandia,- salah satu sumber daripada perdjoangan non-kooperasi itu.

Lihatlah disitu sepak-terdjangnja kaum Sinn Fein. „Sinn Fein” adalah merekapunja sembojan, sinn fein, jang berarti „kita sendiri”.

„Kita sendiri!”, itulah gambarnja mereka-punja politik; politik tidak mau bekerdja bersama-sama dengan Inggeris tidak mau kooperasi dengan Inggeris, tidak mau duduk didalam parlemen Inggeris. „Djanganlah masuk ke Westminster, tinggalkanlah Westminster itu, dirikanlah Westminster sendiri!”, adalah propaganda dan aksi jang didjalkan oleh Sinn Fein. Adakah mereka itu kaum anarchis? Mereka bukan kaum anarchis, tetapi kaum nasionalis-non-koperator jang prinsipiil. Nah, non-kooperasi kita haruslah non-kooperasi jang prinsipiil pula.

Orang mengandjurkan duduk di Tweede Kamer buat mendjalankan politik-oppositie dan politik-z81...aqne dan memperusahakan Tweede Kamer itu menjadi mimbabar perdjoangan. Politik jang demikian itu boleh didjalkan, dan memang sering didjalkan pula oleh kaum kiri, sebagai kaum O.S.P., kaum komunis, atau kaum C.R. Das cs. di Hindustan jang djuga tidak anti parlemen Inggeris. Tetapi politik jang demikian itu tidak boleh didjalkan oleh seorang nasionalis-non-koperator. Pada saat jang seorang nasionalis-non-koperator masuk kedalam sesuatu dewan kaum pertuanan, ja, pada saat jang ia didalam azasnja suka masuk kedalam sesuatu dewan kaum perutanan itu, sekalipun dewan itu berupa Tweede Kamer Belanda atau Volkenbond,- pada saat itu ia melanggar azas, jang disendikan pada kejakinan atas adanja pertentangan kebutuhan antara kaum pertuanan itu dengan kaumnja sendiri. Pada saat itu ia mendjalankan politik jang tidak prinsipiil lagi, mendjalankan politik jang pada hakekatnja mlanggar azas non-kooperasi adanja!

Kita harus mendjalankan politik non-kooperasi jang prinsipiil, — menolak pada azasnja kursi di Volksraad, di Staten General, didalam Volkenbond. Dan sebagaimana tahadi

telah saja terangkan, maka perkara dewan-dewan ini hanjalah salah satu bagian sahadjja daripada non-kooperasi kita. Bagian yang terpenting daripada non-kooperasi kita adalah: dengan mendidik Rakjat pertjaja kepada „kita sendiri”,- untuk memindjam perka-taan kaum non-kooperasi Ierlandia-, me-njusun dan menggerakkan suatu massa-aksi, suatu *machtvorming* Marhaen jang heibat dan kuasa!”

Pembatja telah ingat: ini adalah sebagian dari-pada tulisan saja didalam bertukaran fikiran de-ngan sdr. Mohammad Hatta. Pendirian sdr. Mo-hammad Hatta, jang masih suka masuk parlemen negeri Belanda itu, memang kurang benar, me-mang menjalahi azas. Partai Sarekat Islam Indo-nesia pun didalam kongresnja jang achir-achir ini menolak sesuatu kursi didalam parlemen negeri Belanda itu!

Tetapi bagaimanakah djelasnja „kesendirian” jang saja sebutkan diatas tahadi? Bagaimanakah djelasnja politik „segala-gala sendiri”, yakni politik „kemampuan sendiri, tenaga sendiri, usaha sendiri, kepandaian sendiri, keringat sendiri, fi’il-fi’il keberanian sendiri” itu tahadi?

Bagaimana djelasnja? Djelasnja ialah, bahwa „kesendirian” itu haruslah keperibadian, dan bukan kedirian. Djelasnja ialah, bahwa kita, harus berpolitik keperibadian, dan djangan berpolitik kedirian. Teka-teki? Memang, terdengarnja seperti teka-teki. Terdengarnja seperti kemikan pat-pat-guli-pat. Marilah saja terangkan jang agak djelas: Tentang politik „kesendirian” itu diwaktu jang achir-achir ini banjak sekali orang jang salah faham. Mereka jang salah faham itu tentu sahadjja orang-orang jang masih hidjau diatas lapangan politik orang-orang jang tua bangka tapi kurang garmnja politik, orang-orang jang tiada „benul” sedikitpun tentang urusan politik. Mereka berkata, bahwa kita, karena kita berazas „kesendirian”, tidak boleh mentjari perhubungan samasekali dengan lain-lain bangsa. Mereka pernah mengeritik saja, karena saja didalam sidang pembantu madjallah „Suluh Indonesia Muda” telah memasukkan dua orang Tionghoa, ja’ni saudara Kwee Kek Beng dan saudara Dr. Kwa Tjoan Siu. Mereka menuduh saja telah melanggar azas „kesendirian” itu!

Mereka dengan tuduhan ini telah membuktikan, bahwa mereka adalah „salah wissel” sama-kali, salah faham samasekali, tersesat samasekali. Amboi, — tidak boleh mentjari perhubungan samasekali dengan lain-lain bangsa! Inilah „kesendirian” jang sebenarnya kedirian jang setulen-tulennja. „Kesendirian” jang demikian itu, jang mau melepaskan semua perhubungan dengan dunia luaran, jang mau „bersarang” didalam dunia sendiri, jang mau menutup diri sen-

diri dengan rasa puas-puas dari segala pengaruhnja dunia sekelilingnja, „kesendirian” jang demikian itu adalah sangat berbau butek seperti bau-nja hawa gudang jang senantiasa tertutup.

„Kesendirian” jang demikian itu adalah kesendirian orang jang sempit budi.

„Kesendirian” jang demikian itu adalah kesendirian katak dibawah tempurung. „Kesendirian” jang demikian itu adalah djuga kesendirian orang jang tiada betul samasekali tentang radicales taktiek, tiada begug samasekali tentang radicales bevrijdingspolitiek.

Sebab radicales bevrijdingspolitiek adalah djustru menjuruh kita mentjari perhubungan dengan dunia luaran. Imperialisme jang meradjalela di Indonesia hanjalah bisa kita kalahkan dengan selekas-lekasnja, kalau kita berdjabat tangan dengan bangsa-bangsa Azia diuar pagar, mengadakan eenheidsfront, barisan persatuan, dengan bangsa-bangsa Azia diluar pagar. Imperialisme jang kini ada di Indonesia bukan lagi imperialisme Belanda sahadjja seperti sediakala, imperialisme jang kini ada disini sudahlah mendjadi imperialisme internasional jang bermatjam-matjam warna. Didalam bagian 2 dari risalah ini sudah saja terangkan: Raksasa modern-imperialisme jang ada disini, kini bukan lagi raksasa biasa, tetapi sudah mendjelma djadi raksasa Rahwana Dasamuka jang sepuluh kepala dan mulutnja, — badannja imperialisme Belanda, tapi badan ini memikul kepala imperialisme Inggris, kepala Imperialisme Amerika, kepala imperialisme Djepang, Perantiis, Djerman, Italia dan lain-lain: di Sumatera Timur sahadjja djumlahnja modal cultures jang bukan modal Belanda adalah f 281.497.000, ditanah Djawa f 214.352.000, di Sumatera Selatan f 33.144.000, diperusahaan minjak nama Shell dan Koninklijke adalah nama jang bukan Belanda lagi.

Raksasa Rahwana Dasamuka jang demikian ini ta’ dapat dikalahkan dengan „kesendirian” jang seperti katak dibawah tempurung. Lenjapkanlah semangat katak itu, lenjapkanlah kedirian itu, tetapi lihatlah betapa Rakjat India kini bergulat mati-matian dengan imperialisme Inggris, lihatlah betapa Rakjat Philippina habis-habisan tenaga melawan imperialisme Amerika, betapa Mesir menghantam imperialisme Inggris, betapa Indo China memukul imperialisme Perantjis, betapa Tiongkok berkeluh kesah melawan imperialisme internasional dan imperialisme Djepang. Lihatlah, betapa imperialisme-imperialisme jang diusahakan gugurnja oleh bangsa-bangsa tetangga itu, satu per-satunja djuga duduk diatas masjarakat kita, mendjadi kepala-kepalanja Rahwana Dasamuka jang kita musuhi itu! Lemparkanlah semangat katak itu djauh-djauh, dan insjapkanlah betapa faedahnja kita berdjabat tangan dengan bangsa-bangsa tetangga itu, jang sebenarnya satu musuh dengan kita, satu

awan dengan kita, satu seteru, satu tandi-
gan! Lemparkanlah djauh-djauh tempurungmu,
lan tjarilah perhubungan dengan semua musuh-
nusuhnja Rahwana Dasamuka jang kita musuhi!

Inilah „kesendirian” jang berbedaan bumi-
angit dengan kedirian jang sempit-budi. Kesen-
liran tidak melarang perhubungan dengan lain-
lain bangsa, tidak melarang pekerdjaan-bersama
dengan lain-lain bangsa, — kesendirian adalah
suatu r a s a - k e m a m p u a n, suatu r a s a k e b i -
s a a n, suatu r a s a - k e t e n a g a a n, suatu r a s a
k e p e r i b a d i a n, jang menjuruh sebanjak-ba-
njak dan seboleh-boleh berusaha sendiri, te-
tapi tidak mengharamkan pekerdjaan-bersama
dengan luar pagar bilamana b e r f a e d a h dan
p e r l u. Imperialismelah, dan bondorojotnja im-
perialismelah jang harus kita ingkari, tetapi mu-
suh-musuh imperialisme adalah kawan kita! Lem-
parkanlah „kesendirian” jang sempit-budi itu dan
ambtlah kesendirian jang lebar-budi, lemparkan-
lah k e n d i r i a n itu dan ambillah k e p r i b a d i -
a n ini!

O, insjaf, insjaf! bahwa „pendjaga” jang
mendjaga „orde en rust” Indonesia bukanlah lagi
„pendjaga” Belanda sahadj! Pendjaga „orde
en rust” itu, sedjak adanja opendeur-politiek jang
nemasukkan matjam-matjam imperialisme melau-
i pintu-gerbang perekonomian Indonesia, ada-
lah pendjaga i n t e r n a s i o n a l, jang terdiri
dari pendjaga Belanda, pendjaga Inggeris, pen-
djaga Amerika, pendjaga Perantjis, dan lain-lain.
Memang djustru buat itulah disini diadakan
opendeur-politiek, djustru buat teguhnja pen-
djagaan itulah disini diadakan politik „pintu-
terbuka”. 1) Internasional-imperialisme itu, jang
ang masing-masing kini di Indonesia mempu-
njai kepentingan jang harus „selamat”, interna-
sional-imperialisme itu kini m a s i n g - m a s i n g
m e n d j a g a dengan seawas-awasnja djangan
sampai „keselamatan” kepentingannya itu ter-
ganggu. Internasional-imperialisme itu masing-
masing berkata: „di Indonesia saja ada menjim-
an radja-berana, marilah saja ikut mendjaga,
djangan sampai radja-berana itu hantjur’. Oleh
arena itu, tidaklah suatu kebaikan, tidaklah
suatu kefaedahan, tidaklah suatu k e h a r u s a n,
jang dimuka persekutuan imperialisme-interna-
sional itu kita hadapkan pula persekutuan bangsa-
angsa jang masing-masing djuga melawan impe-
rialisme-internasional itu? Tidakkah dus dida-
am hakekatnja suatu penghianatan kepada kita-
unja Grote Zaak, djikalau kita dimukanja per-
sekutuan imperialisme ini berpolitiknya katak
bawah tempurung?

Duabelas tahun jang lalu benggol-benggolnja
internasional-imperialisme telah berkonferensi

Pertimbangan lain buat mengadakan opendeur-pol-
itiek itu ialah buat mengadakan politik „evenwicht”,
jaitu supaya Indonesia djangan „dlambil” oleh sesuatu
imperialisme lain.

bersama-sama dikota Washington guna membi-
tjarakan „keadaan dibenua Azia”. Duabelas bu-
lan jang lalu, lebih sedikit, Albert Sarraut di-
muka suatu imperialistisch congres dikota Parijs
memperkuat lagi „pembitjaraan” ini: „Negeri-
negeri jang berkoloni harus rukun satu sama
lain. Mereka kini tak boleh bermusuh-musu-
han lagi, tetapi harus bekerdja bersama-sama”.
Dan duabelas bulan jang lalu pula, Colijn menge-
luarkan njanjian jang sama lagunya. Maka karena
itu, djikalau raksana-raksasa-imperialisme beker-
dja bersama-sama, marilah kita korban-korban-
nja raksasa-raksasa-imperialisme itu, djuga be-
kerdja bersama-sama. Marilah kita djuga menga-
dakan eenheidsfront daripada pradjurit-pra-
djurit kemerdekaan Azia. Djikalau Banteng Indo-
nesia sudah bekerdja bersama-sama dengan
Sphinx dari negeri Mesir, dengan Lembu Nandi
dari negeri India, dengan Liong-Barongsai dari
negeri Tiongkok, dengan kampiun-kampiun ke-
merdekaan dari negeri lain, — djikalau Banteng
Indonesia bisa bekerdja bersama-sama dengan
semua musuh kapitalisme dan inter-
nasional imperialisme diseluruh dun-
ia, wahai, tentu hari-harinja internasional-
imperialisme itu segera terbilang!

Nah, inilah kesendirian jang sedjati, keperi-
badian jang sedjati: pertjaja pada kekuatan
sendiri, pertjaja pada kemampuan sen’diri,
seboleh-boleh dan sebanjak-banjak bekerdja
sen’diri, — tetapi mata melihat keluar pagar,
tangan dilantjarkan keluar pagar itu djikalau ber-
faedah dan perlu. Keperibad’an inilah jang harus
mengganti kedirian jang bersemangat katak!

8. MACHTSVORMING. RADIKALISME. MASSA-AKSI

Sara mau kesana, sini mau kesini, — begitulah
gambarnja petentangan disesuatu koloni. Perten-
tangan inilah jang tahadi membawa kita keatas
padangnja politik selfhelp dan non-cooperation.
Tetapi: pertentangan itu membawa kita djuga ke-
dalam kawah tjandradimukanja politik-machts-
vorming, radikalisme dan massa-aksi.

Apa artinja machtsvorming itu? Machtsvorming
adalah berarti vormingnja macht, pembikinan te-
naga, p e m b i k i n a n k u a s a. Machtsvorming
adalah djalan satu-satunya untuk memaksa
kaum sana tunduk kepada kita. Paksaan ini
adalah perlu, oleh karena „sana mau kesana, sini
mau kesini”. Dengarkanlah apa jang tempohari
saja katakan dalam sajumpunya pleidooi :

„Machtsvorming, pembikinan kuasa,
— oleh karena soal kolonial adalah soal kuasa,
soal m a c h t. Machtsvorming, oleh karena seluruh
riwayat dunia menundukkan, bahwa perobahan-
perobahan besar hanjalah diadakan oleh kaum jg
menang, kalau pertimbangan akan u n t u n g r u g i
menjuruhnja, atau kalau sesuatu m a c h t me-
nuntutkannya.

„Ta' pernahlah sesuatu kelas suka melepaskan hak-haknja dengan ridlanja kemauan sendiri,” — „noot heft een klasse vrijwillig van haar bevoorrechte positie afstand gedaan”, begitulah Karl Marx berkata... Selama Rakjat Indonesia belum mengadakan sesuatu *macht* jang maha sentausa, selama Rakjat itu masih sahadj tertjerai berai dengan tiada kerukunan satu sama lain, selama Rakjat itu belum bisa mendorongkan semua kemauanjja dengan suatu kekuasaan jang teratur dan tersusun, — selama itu maka kaum imperialisme jang mentjahari untung sendiri itu akan tetaplah memandang kepadanja sebagai seekor kambing jang menurut, dan akan terus mengabaikan segala tuntutan-tuntutannja. Sebab, tiap-tiap tuntutan Rakjat Indonesia adalah merugikan kepada imperialisme; tiap-tiap tuntutan Rakjat Indonesia tidaklah akan diturutinja, kalau kaum imperialisme tidak terpaksa menurutinja. Tiap-tiap kemenangan Rakjat Indonesia adalah buahnja desakan jang Rakjat itu djalankan, — tiap-tiap kemenangan Rakjat Indonesia itu adalah suatu *afgedwongen concessie!*”¹⁾

Mendjadi dus: *machtsvorming* adalah perlu oleh karena, berhubung dengan adanja antitesa antara sana dan sini, kaum sana tidak mau dengan keridlaannja kemauan sendiri tunduk kepada kita, djka tidak kita paksa dengan desakan jang ia tak dapat menahannja. Dan oleh karena desakan itu hanja bisa kita djalankan bilamana kita mempunjai tenaga, ja'ni bilamana kita mempunjai kekuasaan, mempunjai *macht*, maka kita harus menjusun *macht* itu, — mengerdjakan *machtsvorming* itu dengan segiat-giatnja dan seradjinradjinnja!

Kita harus djauh dari politiknja kaum lunak, jang selamanja mengira, bahwa sudah tjukuplah dengan mejakinkan kaum sana itu tentang keadilannja kitapunja tuntutan-tuntutan: mereka mengira, bahwa kaum sana itu, asal sahadj sudah „bebalik fik'ran”, tentu akan menuruti segala kitapunja kemauan. Amboi, djikalau benar sana gegitu, barangkali Indonesia sudah lama merdeka! Djikalau benar kaum sana begitu, maka kita semua boleh tidur, dan hanja satu dua orang sahadjja daripada kita boleh „bitjara” dengan kaum sana itu, „membalikkan fik'ranja”! Tetapi keadaan jang senjatanja tidak begitu. Keadaan jang senjatanja ialah, bahwa kaum sana disini itu tidak buat mendengarkan keadilannja kitapunja tuntutan, tidakpun buat menurut kitapunja tuntutan itu bilamana „sudah ternjata adilnja”, tetapi ialah ta' lain ta' bukan buat urusan sendiri, buat kepentingan sendiri, buat keuntungan sendiri, — adil atau tidak adil. Keadaan

1) *Artinja concessie*: Kalau simusuh, karena desakan kita, lantas menuruti sebagian atau semua tuntutan-tuntutan kita, maka simusuh itu adalah mendjalankan *concessie*.

jang senjatanja ialah, bahwa „sana mau kesan sini mau kesini”.

Maka oleh karena itulah kaum Marhaen Indonesia jang didalam politiknja selamanja harudjauh sekali daripada pengalamunan jang bertentangan dengan keadaan jang njata, jang selamanja harus berdiri diatas bumi jang njata dan tidak boleh terapung-apung diatas awannja gegasan, harus menolak politik otak-angin daripada kaum lunak itu, dan mendjalankan politik mentah sementah-mentahnja, jaitu: menjusun dimukamachtnja imperialisme itu *macht*nja kaum Marhaen pula. Memang jang sebenar-benarnja disebutkan politik, itu bukanlah kepandaian putar lidah, bukan kepandaian menggerutu dengan hati dendam terhadap pada kaum sana bukan kepandaian tawar-menawar, tetapi politik buat kaum Marhaen hanjalah menjusun *machtsvorming* dan memperusahakan *machtsvorming* itu, — *machtsvorming* jang terpikul oleh azas jang radikal. Jawaharlal Nehru, itu pemimpin Rakjat India, pernah berkata: „Djikalau kita bergerak, maka haruslah kita selamanja ingat, bahwa tjita-tjita kita ta' dapat terkabul, selama kita belum mempunjai kekuasaan jang perlu untuk mendesakkan terkabulnja tjita-tjita itu.

Sebab kita berhadap-hadapan dengan musuh jang tak sudj menurut tuntutan-tuntutan kita, walaupun jang seketjil-ketjilnja. Tiap-tiap kemenangan kita, dari jang besar-besar sampai jang ketjil-ketjil, adalah hatsilnja desakan dengan kitapunja tenaga. Oleh karena itu „teori” dan „prinsip” sahadj buat saja belum tjukup. Tiap-tiap orang bisa menutup dirinja didalam kamar, dan menggerutu „ini tidak menurut teori”, itu tidak menurut prinsip. Saja tidak banjak menghargakan orang jang demikian itu. Tetapi jang palng sukar ialah, dimuka musuh jang kuat dan membuta-tuli ini, menjusun suatu *macht* jang terpikul oleh suatu phinsip. Keprinsipilan dan keradikalan zonder *machtsvorming* jang bisa menundukkan musuh didalam perdjjoangan jang haibat, balehlah kita buang kedalam sungai Gangga. Keprinsipilan dan keradikalan jang mendjelmakan kekuasaan, itulah kemauan Ibu!

Perkataan Jawaharlal Nehru ini adalah perkataan jang tjgtjok sekali buat perdjjoangan Marhaen di Indonesia melawan musuh jang djuga kuat dan membuta-tuli itu. Djuga kita kaum Marhaen Indonesia ta' tjukup dengan menggerutu sahadjja. Djuga kita harus mendjelmakan azas atau prinsip kita kedalam suatu *machtsvorming* jang maha kuasa. Djuga kita harus insjaf seinsjaf-insjafnja, bahwa imperialisme ta' dapat dialahkan dengan azas atau prinsip sahadjja melanakan dengan *machtsvorming* jang terpikul oleh azas atau prinsip itu!

Jang terpikul oleh azas atau prinsip! Sebab „*machtsvorming*” jang tidak terpikul oleh azas

tau prinsip, sebenarnya bukan machtsvorming, bukan pembikinan kuasa! ((Machtsvorming" yang zonder azas atau prinsip, jaitu „machtsvorming" yang opportunistis alias tawar-menawar, yang siskapnja sebentar begini sebentar begitu menurut anginnja kaum sana, yang tidak perempuan tidak laki-laki,-„machtsvorming" yang demikian itu bukan suatu mach t yang men un u k k a n (kaum sana, tetapi suatu bola yang dimainkan oleh kaum sana belaka.

Tetapi machtsvorming kita haruslah machtsvorming yang terpukul oleh suatu azas: azas antitesis antara sana dan sini, azas perlawanan-zonder-damai antara sana dan sini, azas kemerdekaan-nasional, azas ke Marhaenan, azas bukan tawar-menawar tapi mau menggugurkan stelsel kapitalisme-imperialisme samasekali, azas mau mendirikan suatu masyarakat baru atas runtuh-runtuhannya kapitalisme-imperialisme itu, yang terpukul oleh kesamarasama-rataan. Azas inilah yang boleh ditjakup dengan satu perkataan sahadjja, jaitu radikalisme. Radikalisme,- terambil dari perkataan radix, yang artinja akar, radikalisme haruslah azas machtsvorming Marhaen: berdjoang tidak setengah-setengah tawar-menawar tetapi tedjun sampai ke akar-akar njja kesengitan antitesis, tidak setengah-setengah hanja mentjari „untung ini hari" sahadjja tapi mau mendjebol stelsel kapitalisme-imperialisme sampai ke akar-akar njja, tidak setengah-setengah mau mengadakan perubahan-perubahan yang ketjil-ketjil sahadjja tapi mau mendirikan masyarakat baru samasekali diatas akar-akar yang baru, — berdjoang habis-habisan tenaga membongkar pergaulan hidup berkarang ini: sampai ke akar-akar njja untuk mendirikan pergaulan hidup baru diatas akar-akar yang baru. Radikalisme inilah harus menjadi njawanja machtsvorming Marhaen. Marhaen harus menolak dengan kedjikian segala kap setengah-setengah yang tidak berdjoang tetapi hanja tawar-menawar, Marhaen harus mengusir dari kalangan Marhaen segala opportunisme, reformisme, dan possibilisme yang selamanja menghitung-hitung rugi sebagai djuru kedai yang takut uangnja hilang sepepeng. Marhaen harus mengusir djauh-djauh segala politik yang mau menutupi atau menipiskan antitesis antara sana dan sini, Marhaen malahan harus menadjamkan antitesis antara sana dan sini itu, tidak mau berdamai tawar-menawar dengan kaum sana itu, tetapi berdjoang habis-habisan dengan kaum sana walau kemuka pintu-gerbangnja berkapun djua adanja. Marhaen harus dengan sekelebatan mata sahadjja mengerti, bahwa perdjogannja, yang bermaksud membongkar kapitalisme-imperialisme sampai ke akar-akar njja itu, tidak bisa berhatsil dengan politik reformisme yang mau „berniaga" dengan kaum kapitalisme itu, yang ismenja mau ia gugurkan itu. Marhaen harus

mengambil perkataannja Karl Leibknecht, bahwa „perdamaian antara Rakjat-djelata dengan kaum atasan adalah berarti mengorbankan Rakjat-djelata itu",- membinasakan Rakjat-djelata itu. Marhaen dus, untuk mengulangi lagi, harus berdjoang zonder damai sampai ke akar-akar njja kesengitan antitesis, berdjoang zonder damai mendjebol akar-akar njja stelsel kapitalisme-imperialisme, berdjoang zonder damai menanam akar-akar njja pergaulan hidup yang baru,- berdjoang zonder damai dengan bersemangat radikalisme dan sepak-terdjang radikalisme!

Tetapi bagaimanakah djalan-djalannja kaum Marhaen mendjelmakan machtsvorming yang berazas radikalisme itu? Tidak ada djalan dua, tidak ada djalan tiga, melainkan ada satu djalan sahadjja: djalannja massa-aksi. Dengan massa-aksi kaum Marhaen bisa mengobarkan semangatnja sampai kepuntjaknja angkasa, dengan massa-aksi mereka bisa menghaibatkan kemauannja mendjadi sehabatnja gelombang samodra, dengan massa-aksi mereka bisa mengolah merekapunja tenaga mendjadi tenaganja gempap. Dengan massa-aksi mereka bisa menjusun-njusun merekapunja geest, mereka punja wil, merekapunja daden,- dengan massa-aksi mereka bisa menjusun merekapunja machtvorming sampai sekuasa-kuasannya. Machtvorming bukanlah penjusunan tenaga wadag sahadjja, machtvorming adalah djuga penjusunan tenaga semangat, tenaga kemauan, tenaga roch, tenaga Njawa. Rochani dan djasmaninja massa mendjadilah seolah-olah disiram air Kahuripan didalam massa-aksi itu. Apa jang Marhaen satu persatunja tidak bisa mentjiptakan, apa jang Marhaen satu persatunja tidak bisa „menjematkan" dan „memaukan", dapatlah ditjiptakan oleh luluhan Marhaen yang sudah mendjadi massa itu. Semangatnja massa, kemauannja massa, keberaniannja massa, „apinja" massa, bukanlah sama dengan semangat atau kemauannja Marhaen satu per satu, bukanpun sama dengan djumlahnja semangat atau kemauan Marhaen-Marhaen itu semuanja,- tetapi massa seolah-olah mempunjai „semangat massa" sendiri, „kemauan massa" sendiri, „keberanian massa" sendiri, „api massa" sendiri, yang lebih-lebih haibat daripada djumlah semangat-semangat atau kemauan-kemauan itu adanja. „Api massa" inilah melahirkan „perbuatan-perbuatan massa" yang haibatnja bisa sampai menggojangkan sendi-sendi njja masyarakat, ja, sampai menggugurkan masyarakat dengan segala sendi-sendi dan alas-alasnja.

Sebab, apakah arti massa itu? Massa bukanlah tjuma „Rakjat-djelata yang berdjuta-djuta" sahadjja, massa adalah rakjat-djelata yang sudah terluluh mempunjai semangat satu, kemauan satu, roch dan njawa satu. M a s s a adalah berarti deeg, djeladrén, luluhan. Ia dus bukan

gundukan Rakjat-djelata sahadja jang berlain-lainan semangat dan kemauan, ia bukan mitsalnja gudukan Rakjat-djelata pada wktu hari Lebaran,- jang sebagian pergi kekuburan, jang sebagian ingin pergi berdjalan-djalan pamer pakaijanja jang baru, sebagian lagi ingin pergi menemui pamili keluarganja untuk bersilatur-rahmi-, ia adalah satu luluhan jang satu semangatnja, satu kamauannja, satu tekadnja, satu rohani dan djasmaninja. Ia didalam riwayat dunia selamanja adalah gundukan Rakjat-djelata, jang karena sama-sama menderita tindasan daripada kaum atasan dan sama-sama menderita nasib sengsara jang seolah-olah ta' dapat terpikul lagi, sama-sama pula timbul rasa kemarahannya, sama-sama timbul kehendaknja melawan keadaan jang menjengsarakan mereka itu, sama-sama berdjoang membongkar keadaan itu, - sama-sama terluluh mendjadi satu luluhan radikal jang gerak-bangkit bergelora sebagai ombak membanting dipantai.

Inilah jang dinamakan massa-aksi: aksinja Rakjat-djelata jang sudah terluluh mendjadi jiwa baru, melawan sesuatu keadaan jang memassa-aksi adalah membuka dan mendjebol akar-akarnja sesuatu keadaan. Memang massa-aksi adalah selamanja mau menanam akar-akarnja keadaan jang baru. Perobahan-perobahan besar didalam riwayat dunia selamanja diparadjikan oleh massa-aksi,- begitulah saja diatas tahadi berkata. Memang massa-aksi tidak bisa haibat kalau setengah-setengahnja, massa-aksi tidak bisa haibat kalau hanya mau mengedjar „keuntungan-keuntungan ketjil-ini-hari” sahadja. Massa-aksi barulah dengan sesungguhnya berderus-derusan mendjadi massa-aksi, djikalau Rakjat-djelata itu sudah berniat membongkar samasekali keadaan tua diganti samasekali dengan keadaan baru. „Een nje u w levens-ideaal moet de massa aanvuren”, „suatu tjita-tjita pergaulan hidup baru harus menjala didalam dadanja massa”, begitulah menurut seorang pemimpin besar sjaratnja massa-aksi. Maka oleh karena itulah bagi kita kaum Marhaen satu kali akan datang saatnja, jang djuga massa-aksi kita akan hidup dan bangkit sehaibat-haibatnja: Kitapunja tjita-tjita, kitapunja idealisme bukanlah suatu idealisme politik sahada, kitapunja idealisme bukanlah „Indonesia-Merdeka” sahadja, kitapunja idealisme adalah idealisme masjarakat baru, suatu sociaal idealisme jang gilang-gemilang. Sociaal idealisme inilah jang mendjadi motor pertama dari kitapunja massa-aksi!

Kaum lunak disini djuga sering mengemak-kekemikkan perkataan „massa-aksi”. Kaum lunak disini djuga mau mengadakan „massa-aksi”. Amboi! Seolah-oleh massa-aksi bisa dipisahkan daripada radikalisme. Seolah-olah Rakjat-djelata bisa mendjadi massa karena tjita-tjita jang bukan tjita-tjita Rakjat-djelata, ja'ni tjita-tjita „bank-

bank-an”, „rumah-sakit-sakitan”, „warung warungan”. Seolah-olah apinja Rakjat-djelata bisa dipasang dan didjadikan api-massa dengan api melempemnja politik „pelan-pelan” jang tidak bermaksud lenjapnja kapitalisme-imperialisme sampai keakar-akarnja. Seolah-olah massa-aksi bisa „dibikin” dengan mereka punja politik jang sampai kiamat „berfikir” dan „menghitung-hitung”. Seolah-olah riwayat-dunia tidak saban-saban menundjukkan, bahwa „nimmer kan de massa langs den weg der zuiver verstandelijke berekening tot heroische daden be zield worden”, ja'ni bahwa „massa ta' pernah bisa d'suruh melahirkan perbuatan-perbuatan besa dengan politik menghitung-hitung”! 1)

O, kini kita mengerti: mereka memang tidak tahu apakah massa-aksi itu! Mereka mengira bahwa massa-aksi adalah vergadering-vergadering-openbaar jang berbarengan. Mereka mengira sudah „mengadakan massa-aksi”, kalau sudah mengadakan rapat-rapat-umum dimana-mana. Haha, mereka mengira bahwa „massa-aksi” itu boleh mulai pukul sembilan pagi dan berhenti pukul satu siang! Kalau begitu gampang membikin massa-aksi, kalau begitu gampang massa-aksi boleh „diperintahkan” menurut „sakera-sakera-nja” djuragan pemimpin, barangkali massa-aksi di Indonesia sahaibat-haibatnja, dan..... Indonesia sudah merdeka! Tetapi tidak! Massa-aksi bukan „vergadering-vergadering-openbaar jang berbarengan”, massa-aksi bukanpun suatu kedjadian jang boleh „diperintahkan” harus mulai pukul sembilan neng pagi-pagi! Massa-aksi tidak bisa „diperintahkan” atau „dibikin” orang tidak bisa dipaberikkan oleh pemimpin tidak bisa „harus mulai pukul sembilan neng”, massa-aksi adalah didalam hakekatnja bikinan masjarakat jang mau melahirkan masjarakat baru dan karenanja butuh akan „seorang paradjik”. Massa-aksi adalah aksinja Rakjat-djelata jang karena kesengsaraan, telah terluluh mendjadi satu jiwa baru jang radikal, dan bermaksud „memaradjikan” terahirnja masjarakat baru!

Tidak! Kaum lunak dengan kelunakannya itu memang tidak bisa „mengadakan” massa-aksi. Mereka memang tidak bisa mendjadi motornja mereka memang tidak terpanggil oleh riwayat massa-aksi, untuk mendjadi motornja massa-aksi walaupun mitsalnja perhimpunannya beranggauta ribuan, ketian, djutaan! Sebab-tahad sudah saja terangkan-, massa-aksi adalah memint radikalisme, berisi radikalisme, vooronderstelt radikalisme. Paling mudjur kaum lunak itu dengan kelunakannya, kalau bisa menggerakkan beribu-ribu Rakjat-djelata, hanya melahirkan massa-aksi bekaka.

Apakah massale actie? Massale actie adalah „pergerakan” Rakjat, jang benar orangnja

1) August Bebel.

Ribuan atau ketian atau djutaan, jang benar jumlah orangnja besar sekali, tetapi jang tidak radikal, tidak sociaal-revolutionair, tidak bermaksud membongkar akar-akarnya masyarakat-tua, untuk mendirikan masyarakat baru dengan akar-akar jang baru. Massale actie bukan luluhan Rakjat-djelata jang menjala-njala apimassanja, bukan massa didalam ma'na djeladrèn atau deeg jang satu djiwanja dan satu njawanja, melainkan hanja gerombolan Rakjat belaka jang tidak bernjawa satu. Massala actie ta'bisa melahirkan masyarakat baru, dan memang bukan meradjinja masyarakat jang baru. Lihatlah mitsalnja pergerakan Rakjat Indonesia dulu, tatkala Sarekat Islam baru lahir didunia. Lihatlah pula pergerakan Rakjat di Ngajodya sekarang, ja'ni di Mataram. Ribuan, ketian, laksana, ja milliunan Rakjat sama bergerak, milliunan Rakjat sama beraksi",- tetapi aksinja itu hanjalah suatu massa-aksi, oleh karena tidak bersifat luluhan tapi bersifat gerombolan, tidak sociaal-radicaal tapi sociaal-behoudend, tidak bermaksud memuang segenap masyarakat tua tapi hanja bermaksud menambal amohnja masyarakat itu.

Massa-aksi dan massale actie,- hendaklah pemimpin-pemimpinja kaum Marhaen senantiasanya memperhatikan perbedaannja antara dua perkataan itu. Hendaklah pemimpin-pemimpin itu jangan lekas tersilaukan mata, kalau melihat "banyak orang" sama "bergerak", dan lantas megrag: "ha, Indonesia kini lekas merdeka". Sebab "banyaknja orang", mitsalnja dizaman baru munjulnja Sarekat Islam didunia, tatkala semua huan ada bergerombolan mendjadi satu, tatkala ini ada kaum Marhaennja, ada kaum prijajinja, ada kaum saudagarnja, ada kaum burdjuisja, tatkala Sarekat Islam mendjadi gado-gado aluan Islamisme, nasionalisme dan "sosialisme", tatkala dus pergerakan Sarekat Islam itu bukan pergerakan luluhan tapi hanja suatu pergerakan gerombolan, bukan massa-aksi tetapi massale aksi,- adakah banyak orang dipegerakan Sarekat Islam itu bisa memaradjinja masyarakat baru, bahkan: adakah pergerakan Sarekat, Islam itu bisa menatangkan perobahan² jang agak besar? Adakah begitulah saja malahan bertanja, Sarekat Islam itu bisa membangkitkan suatu massa-aksi? Adak, pergerakan Sarekat Islam jang dulu itu tidak bisa membangkitkan massa-aksi, tidak bisa mendjadi motornja massa-aksi, oleh karena tidak berdiri diatas pendirian jang radikal. Ia tidak berdiri diatas antitese sana-sini, ia tidak berprogram Indonesia-Merdeka, ia tidak berprogram terang-terangan mau mendjebol senau mendjebol semua akar-akarnja stelsel kapitalisme-imperialisme, ia tidak politiek-radicaal, tidak sociaal-radicaal.

Oleh karena itu, maka partai Marhaen jang bermaksud mendjadi partai pelopornja massa-aksi, haruslah selamanja mempunjai azas-per-

djoangan dan program jang 100% radikal: antitese, perlawanan zonder damai, kemarahan, melenjapkan tjara susunan masyarakat sekarang, mentjapai tjara susunan masyarakat baru,- itu semua harus tertulis dengan aksara jang berapi-apian diatas benderanja partai dan diatas pandji-pandjiannja partai. Tetapi azas, azas-perdjoangan dan program jang dituliskan diatas bendera dan pandji itu akan tidak banjak berarti, akan seakan-akan omong kosong, akan tinggal aksara jang mati belaka, djikalau tidak kita kerdjakan dengan habis-habisan kitapunja energie,- membanting kitapunja tulang, memeras kitapunja keringat, mengulur-ngulur kitapunja tenaga mendjelmakan segala apa jang termaktub didalamnja dan segala apa jang didjandjikan kepada massa. Azas, azas-perdjoangan dan program itu akan tinggal aksara jang mati, djikalau kita tidak berdjoang dengan segala keuletannja dan kegagahannja partai pahlawan jang lebih sanggup disuruh bekerdja mati-matian daripada disuruh berhenti, berdjoang mengerdjakan segala kewadjiannya suatu partai pelopor, ja'ni berdjoang membangkitkan massa-aksi dan mengomando massa-aksi itu kearah seorang keunggulan dan kemenangan.

Dan bagaimana partai-pelopor harus berdjoang? Partai-pelopor pertama-tama harus menjempurnakan diri sendiri. Ia belum bisa mendjadi partai-pelopor jang sempurna, sebelum ia sendiri sempurna didalam kejakinannja, didalam disiplinnja, didalam organisasinja, didalam segenap rochaninja dan djasmaninja. Oleh karena itu ia pertama-tama harus memperkokoh rohani dan djasmani sendiri lebih dulu, membikin dan mendjaga jang segenap sifat-hakekatnja, segenap wezennja, adalah teguh dan kokoh sebagai badja.

Rochani dikokohkan dengan penjujukan teori kepada anggauta-anggautanja, penjujukan dengan kursus dan madjallah dan lain sebagainya tentang segala seluk-beluknja nasib mereka, musuh mereka, perdjoangan mereka, agar supaya semua anggauta partai mendjadi satu kajakinan, satu semangat, satu kemauan-maha-haibat mau berdjoang habis-habisan menundukkan musuh jang kini njata-njata angkara-murkanja, melalui djalan jang kini njata-njata terang dan manfaatnja. Hanja dengan penjujukan teori jang demikian itu,- teori jang radikal,- maka partai-pelopor bisa mengeraskan rochaninja mendjadi rohani badja, dan bisa menuntun massa kedalam perdjoangan jang radikal. „Ohne radikale Theorie keine radikale Bewegung „zonder teori-radikal mustahil ada pergerakan-radikal", adalah suatu utjapan Marx jang djitu dan berisi kebenaran jang senjata-njatanja. Segala seluk-beluk pergerakan, seluk-beluknja azas, azas perdjoangan dan program, segala seluk-beluknja strategi dan taktik haruslah mendjadi satu kejakinan jang terang-benderang bagi segenap partai,- satu zat perdjoangan jang menjerapi darah dagingnja segenap anggauta

partai sehingga partai itu mendjadi satu djiwa jang jakin dan ta' kenalan akan sjakwasangka. Tiap-tiap angguta partai jang njelewang kearah reformisme, tiap-tiap fikiran jang njelewang kearah reformisme, harus „ditjutji” sebersih-bersihnja, dan kalau tidak bisa mendjadi „bersih”, ditendang dari kalangan partai zonder pardon dan zonder ampun!

Pembatja membantah: kalau begitu tidak ada demokrasi didalam kalbunja partai! Memang! Partai didalam kalbu sendiri tidak boleh berdemokrasi dalam ma'na segala „isme” boleh leluasa,- partai hanjalah mengenal satu fikiran dan satu isme: fikiran dan isme radikal jang 100% tanggung mengalahkan musuh. Demokrasi jang boleh didalam kalbunja partai-pelopor bukan demokrasi biasa, demokrasi partai-pelopor itu adalah demokrasi jang dengan bahasa asing dinamakan *democratisch-centralisme*: suatu demokrasi, jang memberi kekuasaan pada putjuk-pimpinan buat menghukum tiap-tiap penjelewang, menendang tiap-tiap angguta atau bagian-partai jang membahayakan strijdpositienja massa. „Didalam partai ta' boleh ada kemerdekaan fikiran jang semau-maunja sahadja; kokohnja persatuan partai itu adalah terletak didalam persatuan kejakinan”. Inilah adjaran salah seorang pemimpin besar tentang keperta'an jang sangat harus diperhatikan. Tiap-tiap penjelewang ta' boleh diampuni; tiap-tiap penjelewang harus didenda dengan dampratan jang sepedas-pedasnja atau tendangan jang sesegera-segeranja. Sebab partai-pelopor jang didalam kalbunja sendiri masih slewang-slewang partai-pelopor jang didalam kalangan sendiri masih ragu-ragu, partai pelopor jang demikian itu mustahil bisa memelopori massa!

Dan bukan sahadja mengrukum penjelewang kearah reformisme! Penjelewang kearah anarcho-syndicalisme-pun, penjelewang kearah amuk-amukan zonder fikiran, penjelewang kearah perbuatan-perbuatan atau fikiran-fikiran tjap mata-gelap, harus djuga segera dikoreksi dan mendapat dampratan. Penjelewang inilah jang sering mengeluarkan tuduhan „pengchianatan” alias „verraad”, kalau partai menurut kejakinannya katanja kurang „k'ri”. Penjelewang inilah jang didalam gegelapan mata ta' dapat tahu bedanja antara kekirian radikal dan kekirian desosial,- antara kekirian jang memikul dan terpikul natuur dan kekirian jang memikul dan terpikul hawa nafsu amarah jang tak terimbang. Partai jang sehat harus selamanja memerangi dua matjam penjelewang itu,- selamanja strijden naar twee fronten-, agar supaja ia bisa mendjadi satu penunjuk djalan radikal jang teguh dan jakin bagi bandjirnja massa-aksi jang bergelombang-gelombang menudju kelautan merdeka.

Oieh karena itulah maka salah satu sjaratnja partai-pelopor adalah disiplin. Disiplin,

disiplin jang kerasnja sebagai badja, disiplin jang zonder ampun dan zonder pardon menghukum tiap-tiap angguta jang berani melanggarnja, adalah salah satu njawa dari partai-pelopor itu! Bukan sahadja disiplin terhadap pada ideologinja radikalisme; bukan sahadja disiplin terhadap pada „bagian teori” daripada radikalisme. Tetapi djuga disiplin terhadap pada segala halnja partai: disiplin teori, disiplin organisasi disiplin taktik, disiplin propaganda,-pendeknja partai didalam segala urat-uratnja dan sjaraf-sjarafnja harus sebagai suatu mekanisme jang tiap-tiap sekrap dan tiap-tiap rodanja berdisiplin hingga saksama.

Dalam pada itu partai tidak boleh mendjadi mesin jang ta' bernjawa dan ta' berubah. Partai jang demikian adalah partai jang ta' hidup, dan tofan-zaman akan segeralah menjapnja dari muka bumi. Partai jang memikul dan terpikul natuur haruslah hidup sebagai natuur sendiri, ber-evolusi sebagai natuur sendiri. Jang harus ditjegah dan diperangi bukanalh hidupnja partai, bukanalh evolusijnja partai, bukanalh levensprocesnja partai. Jang harus ditjegah dan diperangi ialah penjakitnja partai, penjakit penjelewang jang membahayakan sehatnja badan-radikalisme itu. Djuga natuur sendiri tidak pernah slewang-slewang, djuga natuur sendiri selamanja memerangi tiap-tiap penjakit! Tiap-tiap barang baru jang menjuburkan dan menjehatkan badan-radikalisme itu haruslah diterima dengan gembara, tetapi tiap-tiap penjakit badan itu harus lekas diobati dengan „kedjam” dan zonder ampun. Centralisme jang harus ada didalam kalbunja partai bukanalh centralismenja seorang dktator, centralisme itu harus *democratisch-centralisme* jang partai sendiri mendjadi tjakrawartijnja. Tetapi sebaliknya demokrasi jang harus didalam kalbunja partai bukanlah pula demokrasi jang memberi keleluasaan pada segala apa sahadja, demokrasi itu haruslah *centralistische democratie* jang memerangi segala penjakitnja radikalisme!

Democratisch-centralisme dan *centralistische democratie*,-itulah sifatnja partai-pelopor bagian kedalam. Tapi bagaimana partai-pelopor itu memelopori massa? Bagaimana sikapnja keluar? Sikap partai keluar haruslah selamanja tjotjok dengan kemauan-jang-onbewust daripada massa, tjotjok dengan instinctnja massa. Tidak boleh ia sedikitpun djuga menjimpang daripada instinct ini, tidak boleh sedikitpun djua ia mengchianati instainet ini. Sebab instinctnja massa itulah jang dinamakan „kekuatan-rahasia” daripada masyarakat. Siapa jang menjalahi kekuatan-rahasia ini, mengchianati kekuatan-rahasia ini, akan segeralah mengalami jang ia dilindas oleh rodanja masyarakat, hantjur-lebur mendjadi debu. Jang harus dikerdjakan oleh partai-pelopor bukannya mengchianati atau merubah kemauan jang-onbewust daripada massa, jang harus diker-

kan olehnya ialah membikin kemauan
-jang-onbewust itu mendjadi
mauan-jang-bewust, memberi „kein-
an” kepada instinct itu hingga mendjadi ke-
an-bewust jang yakin dan terang. Kekuatan-
uan massa jang tahadinja tenang seolah-olah
ir, haruslah dibangunkan dengan Air-Kahuri-
nja Keinsjafan mendjadi kekuatannya massa-
jang bangkit dan ta’ dapat terhalang, ja, jang
ahan bila sudah matang sematang-matangnja,
ndjadi massa-wil jang kehaibatan bangkitnja
menggetarkan dunia.

iliah pekerdjaan partai-pelopor jang pertama :
ngolah kemauan-massa jang tahadinja onbe-
st itu hingga mendjadi kemauan-massa jang
wust. Bentuk dan kontruksinja perdjooan
n harus ia adjarkan pada massa dengan djalan
g gampang dimengerti dan jang masuk sampai
ati-fikirannya dan akal-semangatnja. Ia harus
mbuka-buka mata massa, mengugah-gugah
akinan massa, mengobar-ngobarkan sema-
t masa tentang segala seluk-beluknja nasib
perdjooan massa. Ia harus memberi kein-
an tentang apa sebabnja massa sengsara, apa
abnja kapitalisme-imperialisme bisa meradja-
n, apa sebabnja harus menudju kedjembatan
onesia-Merdeka, bagaimana djembatan itu ha-
djtapai bagaimana membongkar akar-akar
kapitalisme. Ia pendek-kata harus memberi
didikan dan keinsjafan pada massa buat
ia berdjoang, dan bagaimana ia harus
djoang. Dengan banjak propaganda, massa
us dibuka matanja, dirobek kudung ke-onbe-
tannya sehingga mendiadi bewust melihat
ala rahasianja dunia : rapat-rapat umum harus
dengung-dengungkan seruan partai sampai
untjak angkasa, surat-surat-madjallah dan se-
ran harus terbang kian kemari sebagai daun
i jang tertiuip angin dimusim kemarau, de-
strasi-demonstrasi harus beruntun-runtunan
bagai runtunannya ombak samodra. Dengan
an jang demikian itu,- dengan bersikap tjo-
dengan instinctnja massa dan membewust-
instinctnja masa itu-, dengan djalan demiki-
itu, tidak boleh tidak, massa tentu lantas
gndahkan seruannya partai, tentu lantas me-
dang kepada partai itu sebagai suatu pelopor
ia dengan penuh kepertjajaan suka mengi-
n. Diantara obor-obornja pelbagai partai jang
ing-masing mengaku mau menjulahi perdjooan
Rakjat, massa lantas melihat hanja satu
r jang terbesar njalanja dan terterang sinar-
satu obor jang terdepan dialannya, ja’ni
nya kita punja partai, obornja kita punja
kalisme!

api memberi keinsjafan sahadjka belum tjukup,
nberi ke-bewustan sahadjka belum tjukup.
nsjafan adalah benar sangat mengakibat-
kemauan massa, keinsjafan adalah benar
at mengorbankan semangat massa, keinsjafan
ah benar sangat mabadjalkan keberanian

massa-, mengusir tiap-tiap kemauan reformisme
dari darah-daging massa-, tetapi keinsjafan sepan-
djang teori sahadjka belum bisa tjukup. Rakjat
barulah mendjadi radikal didalam segala-
galanja kalau keinsjafan itu sudah dibareng de-
ngan pengalaman-pengalaman sendi-
ri, ja’ni dengan ervingen sendiri.
Pengalaman-pengalaman inilah jang sangat sekali
membuka mata massa tentang kekosongan dan
kebohongan taktik reformisme,- meradikalkan
semangat massa, meradikalkan kemauan massa,
meradikalkan keberanian massa, meradikalkan
ideologi dan activitinja massa. „Bukan sahadjka
Rakjat jang ta’ dapat menulis dan membatja, te-
tapi djuga Rakjat jang terpeladjar, haruslah me-
ngalami diatas kulitnja sendiri, betapa kosong,
bohong, munafik dan lemahnja politik tawar-me-
nawar, dan sebaliknya betapa kaum burdjuis
saban-saban mendjadi gemetar bilamana dihadapi
dengan suatu aksi jang radikal, jang hanja kenal
satu hukum,-hukumnja perlawanan jang ta’ mau
kenal damai”. Inilah adjaran pemimpin besar
jang tahadi djuga sudah sekali saja pindjam per-
kataannya. Oleh karena itu, partai-pelopor tidak
harus hanja membuka mata massa sahadjka;
partai-pelopor harus djuga mem-
bawa massa keatas padangnja peng-
alaman, keatas padangnja perdjooan
ngan. Diatas padangnja perdjooan ini pun
partai-pelopor itu mengolah tenaganya
massa, memelihara dan membesar-besarkan
kekuatannya, mengukur-ukur dan menakar-nakar
keuletannya massa, menggembleng kekerasan-hati
dan energenja massa,- men-,train” segala kepan-
daian dan keberanianja massa untuk berdjoang.
„Lebih menggugahkan keinsjafan daripada semua
teori adalah perbuatan, perdjooan. Dengan ke-
menangan-kemenangan perdjooannya melawan
simusuh, maka partai menudjukkan kepada
massa betapa besar kekuatannya massa itu, dan
oleh karenanja pula, membesarkan rasa-kekuatan
massa dengan sebesar-besarnya. Tetapi sebaliknya
djuga, maka kemenangan-kemenangan ini hanja-
lah bisa terdjadi karena suatu teori, jang memberi
penjulahan kepada massa, bagaimana tjaranja
mengambil hatsil jang sebanjak-banjaknja dari-
pada kekuatan-kekuatannya setiap waktu”,- begi-
tulah perkataan salah seorang pemimpin lain, de-
ngan sedikit perobahan.

Hanja begitulah sikap jang pantas mendjadi si-
kapnja suatu partai-radikal jang dengan yakin mau
mendjadi partai-pelopornja massa : menjulahi
massa, dan berdjoang habis-habisan dengan
massa; menjulahi massa sambil berdjoang dengan
massa,- berdjoang dengan massa sambil menjul-
luhi massa. Didalam perdjooan ini partai-pelo-
por harus selamanja mengarahkan mata massa
dan perhatian massa kepada maksud jang satu-
satunya harus mendjadi idam-idaman massa : gu-
gurnja stelsel kapitalisme-imperialisme via djem-
batan Indonesia-Merdeka. Partai-pelopor harus-

lah selamanja tetap mengonsentrasikan semangat massa, kemauan massa, energie massa kepada satu-satunja maksud itu,- dan tidak lain. Tiap-tiap penjeleungan harus ia buka kedoknja dimuka massa, tiap-tiap pengchianatan kepada radikalisme harus ia hukum mahkamatnja massa, tiap-tiap keinginan akan „menggenuki” untung-untung-ketjil-hari-sekarang harus ia bakar diatas dapurnja massa, tiap-tiap aliran jang hanja mau menambal masjarakat-amoh, ini harus ia musnakan dengan simumnja radikalisme massa. Satu tudjuan, satu arah perlawanan, satu tekad pergulatan, dan bukan dua-tiga, ja’ni tudjuan radikal, — zonder banjak menolah-noleh melihat dan menggenuki hatsil-hatsil-ketjil-ini-hari!

Dus massa t’dak boleh beraksi buat hatsil-hatsil-ketjil-ini hari? Tidak begitu, sama sekali tidak begitu! Massa hanja tidak boleh menggenuki aksi buat hatsil-hatsil-ketjil-ini-hari itu! Massa hanja tidak boleh tertarik oleh manisnja hatsil-hatsil-ketjil itu, sehingga lantas lupa akan maksud besar jang tahadi-tahadinja, atau menomor-duakan maksud-besar jang tahadi-tahadnja itu. Massa sambil berdjalan harus tetap menudju dan mengarahkan matanja kearah puntjak gunung Indonesia Merdeka, dan memandang hatsil-hatsil-ketjil itu hanja sebagai bunga-bunga jang ia sambil lalu petik dipinggir djalan. Sebab, selama stelsel kapitalisme-imperialisme belum gugur, maka massa tidak bisa mendapat perbaikan nasib jang 100% sempurnanja. Tapi, asal tidak „digenuki”, asal tidak dinomor-satukan, maka perdjangan untuk hatsil-sehari-hari itu malahan adalah baik djuga untuk memelihara strijdvaardigheidnja massa. Perdjangan untuk hatsil-sehari-hari itu malahan harus didjalankan sebagai suatu tempat mengolah tenaga dan mengasah hati. — suatu scholing, suatu training, suatu gembengan-tenga didalam perdjangan jang lebih besar. „Ohne den Kampf für Reformen gibt es keinen erfolgreichen Kampf für die vollkommene Befreiung, ohne den Kampf für die vollkommene keinen erfolgreichen Kampf für Reformen”:- „Zonder perdjangan buat perobahan sehari-hari, tiada kemenangan bagi perdjangan buat kemerdekaan; zonder perdjangan buat kemerdekaan tiada kemenangan bagi perdjangan buat perobahan sehari-hari.” Oleh karena itulah maka partai-pelopor harus membikin pergerakan massa itu mendjadi „nationale bevrijdingsbeweging en hervormingsbeweging tegelijk”, pergerakan untuk kemerdekaan dan untuk perbaikan-perbaikan-ini-hari. Ja, partai-pelopor harus mengerti pula bahwa „die Reform ist ein Nebenprodukt des radikalen Massenkampfes” ja’ni bahwa „Perbaikan-ketjil-ketjil itu adalah rontokan daripada perdjangan massa setjara radikal”.

Banjak kaum jang menjebutkan diri kaum: „radikal 100%, jang emoh akan „perdjangan

ketjil” sehari-hari itu. Mereka dengan djidj: mentjibir kalau melihat partai mengadjak mass berdjoang buat turunnja belasting, buat lenjapnja herendienst, buat tambahnja upah-buruh, buat turunnja tarif-tarif, buat lenjapnja bea-bea, buat perbaikan ketjil sehari-hari, dan selamanja dengan angkuh berkata: „Seratus prosen kemerdekaan dan hanja aksi buat seratus prosen kemerdekaan!” Ach, mereka tidak mengetahui, bahwa didalam radicale politiek tidak adalah pertentang: antara perdjangan buat perobahan-sehari-hari dan perdjangan buat kemerdekaan jang leluas tetapi djustru suatu hubungan jang rapat seka suatu „perkawinan” jang rapat sekali, suatu „wissel-werking” jang rapat sekali „Zonder perdjangan buat perobahan sehari-hari, tiada kemenangan bagi perdjangan buat kemerdekaan; zonder perdjangan buat kemerdekaan, tiada kemenangan bagi perdjangan buat perobahan sehari-hari!” Inilah a-b-c-nja radicale actie, in d ha-na-tja-ra-ka-nja perlawanan radical: perlawanan-ketjil sebagai „moment” daripada perlawanan jang besar, perlawanan-ketjil sebagai schak didalam rantai perlawanan jang besar,- berbedasamasekali setinggi langit dengan „perlawanan-nja” kaum reformis iang hingga buta menggenuki perdjangan sehari-hari untuk perdjangan sehari-hari. Sembojannja „kaum 100% jang bebunji: „Seratus prosen kemerdekaan, dan hanja aksi buat seratus prosen kemerdekaan”, sembojan itu harus kita koreksi mendjadi „seratus prosen kemerdekaan, dan aksi apa sahaja jang mentjepatkan seratus prosen kemerdekaan!” dan politik reformisme harus kita enjabkan kedalam kabutnja ketiadaan, kita usir kedalam liang-kuburnja kematian,- melalui kumidi boeketawaannja Rakjat. Demikian, dan hanja demikian partai-pelopor harus bekerdja!

Tetapi toch masih ada satu hal lagi dari „kaum 100%” itu jang harus kita kasih koreksi: mereka biasa sekali mendo’akan Rakjat mendjadi lebih sengsara, katanja supaja Rakjat lantas suka bergerak habis-habisan! Mereka suka-sjukur, kalau belasting dinaikkan, kalau upah-buruh diturunkan, kalau bea-bea diberatkan, kalau tarif-tariff ditinggikan, kalau Marhaen disengsarakan semua „supaja Marhaen lebih radjin suka berak”. O, suatu pendirian jang djahat sekali, suatu pendirian jang durhaka sekali. Orang jang mempunjai pendirian jang demikian itu parat ditutup didalam pendjara seumur hidup! Kalau „pemimpin-pemimpin” jang demikian inilah jang selamanja saja namakan pemimpin-bedjat” jang kepalanja penuh dengan kebutekannja orang jang putus-asa, pemimpin-bedjat jang pikirkan keblinger dan penuh dengan „wanhooptheorie”. Wanhoopstheorie, keputusan-asebutan oleh karena mereka dengan kesengsaraan Rakjat jang sekarang ini tidak bisa membewustkan Rakjat, dan lantas mengharap supaja Rakjat mendjadi lebih sengsara, lebih melarat.

Wanhoopstheorie, oleh karena mereka lekas putus-putus kalau mengalami bahwa Rakjat ta' gampang dan tidak bewustkan dengan satu-dua-tiga, dan lantas mengharap supaya Rakjat le bi h lagi mendekati itu, katanja agar Rakjat lantas gampang sedar dan sukar bergerak setjara radikal! O, pemimpin Rakjat! Pemimpin kedjam! Bergerak tidak buat ringankan nasib Rakjat, tapi bargegak buat... bergerak! „Pemimpin” jang demikian itu boleh merasakan sendiri apa artinja makan hanja satu hari! Mengharap tambahnja kesengsaraan Rakjat! Apakah Rakjat kini belum tjukup kesengsaraan? Belum tjukup megag-megap? Belum tjukup dekat dengan maut? Belum tjukup men-tuhkan air-mata sehari-hari?

Tambahnja kesengsaraan diharapkan buat tam-bahnja radikalisme? Pemimpin-bedjat, buat saja, berparkanlah kalau perlu semua radikalisme dalam samodra, asal kesengsaraan Rakjat hilang! Pemimpin bodoh,- mengira bahwa kesengsaraan sahadja sudah bisa me-lahirkan radikalisme massa! Radikalisme masa tidak bisa lahir dengan hanja kesengsaraan sahadja, tidak bisa subur dengan hanja melaratan sahadja. Radikalisme massa adalah lahir daripada perkawinannja kesengsaraan massa dengan didikan massa, perkawinannja ke-laratan massa dengan perdjjoangan massa! Djikalau kesengsaraan sahadja sudah tjukup buat melahirkan radikalisme massa, amboi, barangkali seluruh Rakjat Indonesia kini sudah radikal dan tambahnja radikal, ja barangkali Indonesia sudah berdeka! Tetapi tidak! Kesengsaraan sahadja tidak tjukup! ..Kesengsaraan memang benar melah-irkan radikalisme massa, tetapi hanja kalau massa itu tidak memikul kesengsaraan itu dengan diam-diam nrimo, melainkan ber-juang habis-habisan melawan ke-sengsaraan itu saban hari”,- begitulah Buknecht pernah berkata. 1) Hanja djikalau ke-sengsaraan itu dibarengi dengan didikan massa, dibarengi dengan perdjjoangan massa, dengan per-anan massa, dengan aksi massa menentang ke-sengsaraan itu, maka kesengsaraan bisa melahir-kan dan menjuburkan radikalisme diantara kala-an massa. Maka oleh karena itu, dengan ke-sengsaraan jang sekarang ini sahadja,- zon-nya harus mengharap lagi tambahnja, seba-nya kaum Wanhoopsthorie-, partai-pelopor sudah ta membikin seluruh massa mendjadi satu-tan radikalisme jang bergelombang-gelom-angan, asal sahadja ia pandai mem-ka mata massa dan pandai mengo-n tanaga massa melawan keseng-saraan itu!

Dan kaum Wanhoopstheorie memberi bukti bahwa bisa mengerdjakan hal jang belakangan ini.

Die Verelendung wird zu Ursache der Radikalisierung der Massen, aber nur deshalb, weil die Massen die wachsende Verelendung nicht passivtragen, sondern sondern einen taglichen Kampf gegen die Verelendung fuhren.

Terkutuklah mereka kalau lantas mendo'akan tambahnja kesengsaraan Rakjat! Audzhubillah himinasj sjaitonirroodzijm!

Tetapi kaum partai-pelopor jang sedjati, kamu harus bisa mengerdjakan sjarat itu! Adakanlah propaganda dimana-mana, adakanlah kursus di-mana-mana, adakanlah perlawanan dimana-mana, adakan anak-anak organisasi, adakan vakhbond-vakhbond, adakan sarekat-sarekat-tani, ja teru-tama vakhbond dan sarekat-tani, ada-kan madjallah-madjallah dan pamflet-pamflet dan risalah-risalah, pendek-kata adakan aksi di-mana-mana, dan massa jang tahadinja tidur se-akan-akan tergendham oleh djapa-mantramnja imperialisme, nistjaja akan bangunlah tertiuip oleh angin-hangatnja aksimu itu. Kamu sanggup bekerdja,- wahai bekerdjalah menurut perdjandjianmu. Beker-djalah dengan segala organisatie-talentmu, bekerdja-lah sepuntjak keuletanmu, bekerlah memeras tenaga-mu menjusun dan membangkitkan partai beserta vakhbond-vakhbond dan sarekat-tani,- sekali lagi terutama vakhbond dan sarekat-tani!-, bekerdjalah pula dengan penamu, dengan mulutmu, dengan gurungmu, dengan lidahmu! Ja, didalam massa-aksi ada faedahnja djuga banjak bergembar-gembor! Gemborkanlah djuga gurungmu sampai suaramu memenuhi alam, gerakanlah djuga penamu sampai udjungnja menjala-njala. Kaum reformis mengedjekkan kamu, bahwa kamu terlalu banjak bergembar-gembor? Haha, itu kaum ngalamun! Tidak mengetahui bahwa tiap-tiap massa-aksi ditiap-tap waktu-pergolakan adalah berupa banjak meng-organisasi dan banjak bergembar-gembor,- ban-jak menjusun, banjak mendirikan banjak krach-ten-construstie dan-formatie dan-combanatie, te-tapi djuga banjak bergembar-gembor dengan mulut dan dengan pena. Biar mereka mengedjek, biar mereka terus ngalamun merekapunja pol tik toch segera akan kedinginan didalam kabut-penga-lamunannja itu. Dan mereka menjebutkan kita kaum „destructief”, ja'ni kaum jang „hanja bisa merusak sahadja”, katanja tidak „construstief” seperti mereka jang „politik”nja ada „buktinja” jang berupa rumah-sakit atau warung-koperasi atau bank atau rumah anak-jatim?

O, perkataan djampi², o, perkataan peneluh, o, perkataan mantram, o, tooverwoord „constructief” dan „destructief”, — begitulah saja pernah marah² dalam S.I.M. 1) dan F.R. 2). Sebagian besar daripada pergerakan Indonesia kini seolah-olah kena dajanja tooverwoord itu, sebagian besar daripada pergerakan Indonesia kini seolah-olah kena dajanja gendhamnja mentram itu! Sebagian besar daripada pergerakan Indonesia mengira, bahwa orang adalah „constructief” hanja kalau orang mengadakan barang² jang boleh di raba sahadja, ja'ni hanja kalau orang men-dirikan warung, mendirikan koperasi, mendirikan

1) "Suluh Indonesia Muda".

2) "Fikiran Ra'jat".

sekolah-tenun, mendirikan rumah anak-anak-jatim, mendirikan bank² dan lain² sebagiannya sahaja, — pendek-kata hanya kalau orang banjak mendirikan badan² sosial sahaja! —, sedang kaum propaganda politik jang sehari-kesehari „tjuma bitjara sahaja” diatas podium atau didalam surat-kabar, jang barangkali sangat sekali menggugahkan keinsjafan politik daripada Rakjat-djelata, dengan tiada ampun lagi diberinja tjap „destructief” alias orang jang „merusak” dan „tidak mendirikan suatu apa”!

Tidak sekedjap mata masuk didalam otak kaum itu, bahwa sembojan „djangan banjak bitjara, bekerdjalah!” harus diartikan didalam arti jang luas.

Tidak sekedjap mata masuk didalam otak kaum itu, bahwa „bekerdja” itu tidak hanya berarti mendirikan barang² jang boleh dilihat dan diraba sahaja, yakni barang² jang tastbaar dan materiil.

Tidak sekedjap mata kaum itu mengerti bahwa perkataan „mendirikan” itu djuga boleh dipakai untuk barang jang abstract, yakni djuga bisa berarti mendirikan semangat, mendirikan keinsjafan, mendirikan harapan, mendirikan ideologi atau geestelijk gebouw atau geestelijke artillerie jang menurut sedjarah-dunia achirnja adalah salah satu artillerie jang hebat buat menggugurkan sesuatu stelsel. Tidak sekedjap mata kaum itu mengerti bahwa terutama sekali di Indonesia dengan masyarakat jang merketjil dan dengan imperialisme jang industriil itu, ada baiknja djuga kita gembargembor, didalam arti membanting kitapunja tulang, mengutjurkan kitapunja keringat, memeras kitapunja tenaga untuk membuka-bukakan matanja Rakjat-djelata tentang stelsel² jang menjengkeram padanja, menggugah-gugahkan keinsjafan-politik daripada Rakjat-djelata itu, dibarengi dengan menjusun-njusun segala tenaganja didalam organisasi² jang sempurna teknijnja dan sempurna disiplinnja, mitsalnja vakbond dan sareka-tani, — pendek-kata menghidup-hidupkan dan membesar-besarkan massa-aksi daripada Rakjat-djelata itu adanja!

Kita boleh mendirikan warung, kita boleh mendirikan koperasi, kita boleh mendirikan rumah-anak-jatim, kita boleh mendirikan badan² ekonomi dan sosial, ja, kita ada baiknja mendirikan badan² ekonomi dan sosial, asal sahaja mengusahakan badan²-ekonomi dan sosial itu sebagai tempat²-pendidikan persatuan radikal dan sepakterdjang radikal. Kita ada baiknja mendirikan badan²-ekonomi dan sosial itu, asal sahaja kita tidak „menggenuki” pekerdjaan-ekonomi dan sosial itu mendjadi pekerdjaan jang pertama, sambil melupakan bahwa Indonesia-Merdeka hanjalah bisa tertjapai dengan politieke massa-aktie daripada Rakjat Marhaen jang hebat dan radikal. Pendek-

kata ada baiknja mendirikan badan²-ekonomi dan sosial itu, asal sahaja kita mengusahakan badan²-ekonomi dan sosial itu sebagai alat² daripada politieke massa-aktie jang hebat dan radikal itu! Kita, kaum massa-aksi, kita djangan terkena „constructivisme” jang menjuruh kita hanya mendirikan warung² dan kedai² sahaja. Kita harus insjaf, bahwa constructivisme kitu bukanlah constructivismenja kaum reformis jang warung-warungan dan kedai-kedai itu, tetapi ialah constructivismenja radikalisme; constructivisme jang tiap² hal jang ia dirikan, baik wadag maupun halu baik benda maupun semangat, adalah dengan tentu bersifat radikal-dynamisch membongkar tiap batu-alasnja gedung stelsel imperialisme dan kapitalisme.

Constructivisme jang mendirikan!

Tetapi djuga constructivisme jang membongkar

Dan kaum reformis boleh terus mengediek atau menggerutu!

9 DISEBERANGNJA DJEMBATAN EMAS

Ja, kaum reformis boleh terus mengedjek dan menggerutu, sebagai kaum reformis India mengedjek dan menggerutu, tapi kemudian kedinginan didalam kabut-pengalamunannja, tatkala Jawaharlal Nehru didalam National Congress jang ke 44 mendjatuhkan vonnis maha-berat diatas pundak mereka dengan kata²: „Saja seorang nasionalis. Tetapi saja djuga seorang sosialis dan republikein. Saja tidak pertjaja pada radja² dan ratu², tidakpun pada susunan masyarakat jang mengadakan radja²-industri jang berkuasa lebih besar lagi dari radja² dizaman sedikala!..... Saja seorang nasionalis, tetapi nasionalisme saja adalah nasionalisme radikal daripada selamat dan silapar, jang bersumpah membongkar susunan masyarakat jang menolak padanja sesuatu nasi!” Memang tiap² orang, jang didalam abad keduapuluh ini masih berani bernasionalisme ngalimun-ngalamunan dan takut akan nasionalisme radikal jang mentah-mentahan, achirnja akan kedinginan tertinggal oleh hangatnja proses natuur sendiri, ia achirnja binasa tertinggal oleh hangatnja proses natuur sendiri. Memang natuurnja abak keduapuluh bukanlah pengalaman jang manjadi sebagai dizaman wajang-wajangan, — natuurnja abad keduapuluh adalah rebutan hidup jang mentah-mentahan. Memang Marhaen bergerak, — begitulah diatas telah saja kemukakan —, tidak karena „idee idealan”, tidak karena „tjita-tjitaan”, Marhaen bergerak ialah tak lain tak bukan buat mentjari hidup dan mendirikan hidup. Hidup kerezekian, hidup kesosialan, hidup kepolitikan, hidup kekeulturannja, hidup keagamaan, — pendek-kata hidup kemanusiaan jang leluasa dan sempurna, hidup-kemanusiaan jang setjara manusia dan selajak manusia.

Adakah Indonesia-Merdeka bagi Marhaen menentukan hidup-kemanusiaan jang demikian itu Indonesia-Merdeka sebagai saja katakan diatas

dalah mendjandjikan tetapi belum pasti menentu-
an bagi Marhaen hidup kemanusiaan jang demikian
u. Perdjandjian itu barulah mendjadi ketentuan,
Kalau Marhaen mulai sekarang sudah awas dan was-
ada, sadar dan prajitna, mendjaga pergerakannya
an menjaring-njaring maksud² pergerakannya itu
angan sampai kemasukan zat² jang sebenarnya
tjnjun bagi Marhaen dan merusak pada Marhaen.
erdjandjian itu barulah mendjadi ketentuan, kalau
Marhaen sedari sekarang sudah insjaf seinsjak-insjaf-
a bahwa Indonesia-Merdeka hanjalah suatu djem-
katan, — sekalipun suatu djembatan emas! — jang
nang dilalui dengan segala keawasan dan keprajitna-
t, djangan sampai diatas djembatan itu Kereta-
emenangan dikusiri oleh lain orang selainnja
Marhaen. Seberang djembatan itu djalan petjah djadi
na: satu ke Dunia Keselamatan Marhaen, satu
Dunia kesengsaraan Marhaen; satu ke Dunia Sama-
ta-sama-rasa, satu kedua sama-ratap-sama-tangis.
ilakalah Marhaen, bilamana Kereta itu masuk ke-
as djalan jang kedua, menudju kealamnja kemo-
lan Indonesia dan keburdjuisan Indonesia!

Oleh karena itu, Marhaen, awaslah awas! Djaga-
h jang Kereta Kemenangan nanti tetap didalam
ndalian kamu, djagalalah jang politieke macht nanti
tuh didalam tangan kamu, didalam tangan besi
mu, didalam tangan badja kamu!

Kamu sekarang mendengar dari kanan-kiri sem-
jan kerakjatan. Kaum radikal bersembojan kerak-
jan, kaum reformis bersembojan kerakjatan, kaum
ntji bersembojan kerakjatan, ja kaum burdjuis dan
ngratpun bersembojan kerakjatan. Kamu sering
ndengar sembojan demokrasi, tetapi apakah satu-
tunjaja demokrasi jang bagi Marhaen dan dari
Marhaen? Apakah satu-satunja demokrasi jang oleh
rtai-pelopor harus dituliskan dengan aksara² api
atas benderanja, sehingga terang bisa terbatja di-
at terang, dan lebih terang lagi disaat rintang-
atangan jang gelap gulita? Didalam revolusi Peran-
s-pun orang berteriak-teriak demokrasi, berpekik
n bersembojan demokrasi, bergembar-gembor dan
rumpah demokrasi, tetapi adakah Marhaen Peran-
s, jang ikut² berteriak demokrasi dan membeli de-
an darahnja kedatangan demokrasi itu, achirnja
ndapat demokrasi jang sebenar-benarnja. — tidak-
h Marhaen Perantjis itu sendiri ditelan habis-
bisan oleh demokrasi itu jang sampai kini saban²
nghantam anak-tjutjunja dan menelan turun-
runannya?

Ja, marilah kita ingat akan peladjaran revolusi
rantjis itu. Marilah ingat akan bagaimana kadang²
sujnja sembojan demokrasi, jang tidak menolong
Rakjat-djelata bahkan sebaliknya mengorbankan
Rakjat-djelata, membinasakan Rakjat-djelata seba-
imana telah terdjadi didalam revolusi Perantjis itu.
Marilah kita awas, djangan sampai Rakjat-djelata
Indonesia tertipu oleh sembojan „demokrasi” sebagai
Rakjat-djelata Perantjis itu, jang achirnja ternjata
nja diperkuda belaka oleh kaum burdjuis jang ber-
mbar-gembor „demokrasi”, — kemerdekaan, per-
maan dan persaudaraan —, tetapi sebenarnya

hanja mentjari kekuasaan sendiri, keenakan sendiri,
keuntungan sendiri! Riwayatnja penipuan Peran-
tjis ini?

Sebelum silamnja abad kedelapanbelas, maka
negeri Perantjis adalah negeri jang feodal dengan
tjara-pemerintahan otokrasi: Kekuasaan-pemerin-
tahan adalah didalam tangannya seorang-orang radja,
jang tiap perkataannya mendjadi wet, tiap pendapat-
nja mendjadi hukum, tiap titahnja mendjadi nasib
seluruh negeri. Ia memandang dirinja sebagai wakil
Allah didunia, memandang kekuasaannya sebagai
gantinja kekuasaan Allah dimuka bumi, ia berkata
bahwa sebenarnya „saat” tidak ada, — staat adalah
dia sendiri. Dan kekuasaan seorang-diri ini, jang
Rakjat-djelata sama sekali tidak mendapat bagian
seudjung kukupun djua, kekuasaan ini ia bentengi
dengan kesetiaannya kaum ningrat dan kaum peng-
hulu-agama, ia bentengi dengan ketuhanannya kaum
adel dan kaum geestelijkheid. Teguh mana-teguhlah
tampaknja feodalisme ini ditengah-tengah lautan
masjarakat Eropah, berdiri seakan-akan batu-karang
ditengah lautan itu lebih dari sepuluh abad lamanja,
sampai..... sampai pada waktu silamnja abad ke-
delapanbelas lautan itu skonjong-konjong berge-
lombang-geombang dan berarus-arusan, bergelom-
bang membanting diatas karang itu dan memetjahkan
segala bagian² dari karang itu.

Apa jang telah terdjadi? Dari dalam dasar-dasarnya
lautan masjarakat feodal itu lambat-laun timbullah
satu golongan-manusia baru, satu kelas baru, satu
elemen baru jang penghidupannya ialah dari meng-
usahakan tenaga orang lain; kelas baru atau elemen
baru daripada kaum burdjuis. Mereka punja per-
usahaan, mereka punja perniagaan, mereka punja
pertukangan, mereka punja arti-ekonomi mulai tim-
bul. Tetapi tidak bisa subur perusahaan dan pernia-
gaan ini dan pertukangan ini, selama tjara pemerin-
tahan masih tjara feodal, selama semua kekuasaan-
pemerintahan masih digenggam si-otokrat radja, —
selama bukan kaum burdjuis sendiri jang mengemudi
perahu pemerintahan. Sebab merekalah, hanja
merekalah, dan bukan kelas lain, — bukan kelas
ningrat, bukan kelas penghulu agama, bukanpun radja
sendiri —, hanjalah merekalah jang lebih tahu mana
hukum², mana aturan², mana tjara pemerintahan
jang paling baik buat suburnja mereka punja per-
usahaan dan mereka punja perniagaan. Oleh karena
itu maka mereka lalu ber-sedia-sedia merebut
kekuasaan pemerintahan dari tangannya radja, meng-
gugurkan stelsel feodalisme jang menghalang-halangi
suburnja mereka punja perusahaan dan perniagaan
itu dari singgasaanja jang ia duduk lebih dari se-
puluh abad itu!

Tetapi, ach, kaum burdjuis tidak mempunyai ke-
kuatan. Kaum burdjuis tidak mempunyai tjukup
kekuatan untuk sitinggilnja otokrasi jang dibentengi
dengan kesetiaannya kaum ningrat dan kaum peng-
hulu-agama itu. Ha, djatuhlah mereka punja mata
pada rakjat djelata jang milliun-milliunan itu. Sedjak
puluhan tahun kaum burdjuis itu memang saban²
mendengar guruh pelan² jang keluar dari kalangan

Rakjat-djelata itu, gemertaknja gigi Rakjat-djelata jang marah karena nasib jang kelewat sengsara. Memang dizaman feodalisme itu Rakjat-djelata ditindas habis-habisan, diperas semua kekajaannya, dirampas semua hak-haknja sehingga tinggal hak menurut dan hak-mengambang belaka. Memang Rakjat djelata sudah lama sekali kesal akan nasib jang lebih djelek daripada nasib binatang itu. Tidakkah gampang kalau kaum burdjuis didalam usahanya merebut politieke macht daripada radja dan ningrat, memakai tenaga Rakjat-djelata itu? Toch Rakjat-djelata tidak sadar, toch Rakjat-djelata tidak bewust, toch Rakjat-djelata tidak akan tahu-menahu bahwa ia hanya disuruh „mengupas angka” dan kena „getah” sahadjja, — burdjuis nanti jang „makan nangkanya”!

Dan burdjuis lalu mendjalankan ketjerdikan ini! „Hiduplah demokrasi” „hiduplah kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan!” „hiduplah liberté, égalité dan fraternité”, — sembojan² ini ia dengung-dengungkan sehingga memenuhi angkasa, sembojan² ini ia kobar-kobarkan dikalangan Rakjat-djelata. Sebagai sinium Rakjat-djelata lantas bergerak, api-kehebitan pergerakannja sampai mendjilat langit, bumi dan angkasa Perantjis gemetar dan petjahan seakan-akan Krisna bertiwikrama. Lautan masjarakat Perantjis jang tenang berabad-abad kini mendjadi bergelombang-gelombang molak-malik, — lautan mendidih jang hantaman-hantamannya membikin remuknja batu karang feodalisme: Radja runtuh, kaum ningrat runtuh, kaum penghulu agama runtuh, otokrasi runtuh, diganti dengan tjara pemerintahan baru jang bernama demokrasi. Dinegeri diadakan parlemen, Rakjat „boleh mengirimkan utusan-utannya keparlemen itu”, — diikuti oleh negeri² Eropah Barat dan Amerika, jang semuanya kini djuga meniru bersistim „demokrasi”.

Ja, Inggris kini mempunjai parlemen, Djerman kini mempunjai parlemen, negeri Belanda kini mempunjai parlemen, negeri Amerika, negeri Belgia, negeri Denemarken, negeri Zweden, negeri Suis, — semua „negeri sopan” kini bersistim „demokrasi”...

Tetapi..... disemua „negeri²-sopan” itu kini hidup dan subur dan meradjalela hantu kapitalisme! Disemua „negeri²-sopan” itu kini Rakjat-djelata tertindas hidupnja, nasib Rakjat-djelata nasib kokoro, djumlahnja kaum penganggur jang kelaparan melebihi bilangan manusia. Disemua „negeri²-sopan” itu Rakjat-djelata tidak selamat, bahkan sengsara-keliwat-sengsara! Inikah hatsil „demokrasi” jang mereka keramatkan itu? Inikah „kerakjatan” jang dinegeri Perantjis mereka beli dengan ribuan mereka punja njawa, dengan ribuan mereka punja bangkai, dengan ribuan pula kepalanja radja dan kaum ningrat? Ach, kaum burdjuis! Kaum burdjuis telah menipu mereka, memperkudakan mereka, mengabui mata mereka. Demokrasi jang mereka rebut dengan harga njawa jang begitu mahal itu, demokrasi itu bukanlah demokrasi kerakjatan jang sedjati, melainkan suatu demokrasi burdjuis belaka, — suatu burgerlijke demokrasi jang untuk kaum burdjuis

dan menguntungkan kaum burdjuis belaka. Ach parlemen! Tiap² kaum proletar kini namanja bisa ikut memilih wakil dan ikut dipilih djadi wakil ke dalam parlemen itu, tiap² kaum proletar kini namanja bisa „ikut memerintah”. Ja, tiap² kaum proletar kini namanja bisa mengusir minister², mendjatuhkan minister² mengusir minister², djatuh terpelantir dari kursinya. Tetapi pada saat jang ia namanja bisa mendjadi „radja” didalam parlemen itu, pada saat ia djuga ia sendiri bisa diusir dari pekerdjaan dimana ia bekerdja mendjadi buruh dengan upah kokoro diusir dilemparkan diatas djalan-rajanya pengangguran, jang basah karena air mata bini dan anak-anak jang kelaparan! Pada saat jang ia namanja bisa mendjadi „radja” didalam parlemen, pada saat ia djuga ia ta’ berkuasa sedikitpun djua menuntut upah perkuliaan jang agak pantas, ta’ berkuasa sedikitpun menghalangi, jang stelsel kapitalisme menelan segalanya nap ia punja badan dan segenap ia punja njawa!

Bahwasanja, kaum Rakjat-djelata jang tahadin dipakai tenaganya oleh kaum burdjuis untuk merebut „demokrasi”, tetapi jang kemudian ternjata ketjerdikan telah mendatangkan demokrasinja kapitalisme, kaum Rakjat-djelata itu kini pantas berbalik menolok demokrasi-palsu itu dengan perkataan² Jean Jaures pemimpin kaum buruh Perantjis, jang berbunyi „Kamu, kaum burdjuis, kamu mendirikan republik dan itu adalah kehormatan jang besar. Kamu merobohkan republik teguh dan kuat, ta’ boleh dirob sedikitpun djua, tetapi djustru karena itu kamu telah mengadakan pertentangan antara susunan politik dan susunan ekonomi. Karena algemeen kiesrecht, karena pemilihan umum, kamu telah membikin semua pekerdjaan duduk bisa bersidang mengadakan rapat jang seolah-olah rapat daripada radja². Mereka punja kemauan adalah sumbernja tiap wet, tiap hukum tiap pemerintahan; mereka melepas mandataris, mereka melepas wetgever dan minister. Tetapi pada saat jang ia siburuh mendjadi tuan didalam urusan politik, pada saat itu djuga ia adalah budak — belian diatas tangan ekonomi. Pada saat jang ia mendjatuhkan minister², maka ia sendiri bisa diusir dari pekerdjaan zonder ketentuan sedikit djuapun apa jang esok harinja akan ia makan. Tenaga — kerdjaan hanjalah suatu barang belian, jang bisa dibeli atau ditampik semau-maunja kaum madjikan. Ia bisa diusir dari bingkil, karena ia ta’ mempunjai hak ikhtisar menentukan aturan² — bingkil, jang saban hari tanpa zonder dia tapi buat menindas dia, ditetapkan oleh kaum madjikan menurut semau-maunja sendiri!”.

Sekali lagi: inikah „demokrasi” jang orang keramatkan itu? Bolehkah ini demokrasi mendjadi impian kita? Tidak, dan sekali tiadak! Ini tidak boleh mendjadi demokrasi jang harus kita tiru, tidak boleh mendjadi demokrasi jang dengan aksara aklamasi harus dituliskan diatas bendera² partai pelopor massa-aksi Indonesia. Sebab „demokrasi” jang begitu hanjalah „demokrasi” parlemen sahadjja, „demokrasi politik sahadjja. Demokrasi-ekonomi, keRakjatan ekonomi, kesama-rasa-sama-rataan-ekonomi tidak ada, tidak adapun bau-baunja sedikit djua.

Ja, demokrasi politik itupun hanja bau-baunja radja! Bukan? — Dinegeri-negeri modern itu mar ada parlemen, benar ada „tempat perwakilan Rakjat”, benar Rakjat namanja „boleh ikut memegah”, tetapi ach, kaum burdjuis lebih kaja daripada Rakjat-djelata, mereka dengan harta-kekajaannya, dengan surat² kabarnja, dengan buku-bukunja, dengan midrasah-midrasahnja, dengan propagandis-propagandisnja, dengan bioskop-bioskopnja, dengan alat² kekuasaannya bisa mempengaruhi semua pikiran kaum pemilih, mempengaruhi semua planja politik.

Mereka mitsalnja membikin „kemerdekaan pers” di Rakjat-djelata mendjadi suatu omongankosong saja, mereka menjulap „kemerdekaan fikiran” di Rakjat-djelata mendjadi suatu ikatan fikiran, mereka memperkosa „kemerdekaan berserikat” mendjadi suatu kedjustaan publik. Merekapunja mau mendjadi wet, mereka punja politik mendjadi politiknja staat, merekapunja perang mendjadi perangnya „negeri”. Oleh karena itu, benar sei perkataannya Caillaux, bahwa kini Eropah dan Amerika ada dibawah kekuasaannya feodalisme baru: tetapi kini kekuasaan feodal itu tidak digenggam kaum tanah sebagai sedia kala, kini ia digenggam oleh perserikatan² industri jang selamanya bisa mendesakkan kemauannya terhadap kepada saat.” Mar sekali djuga perkataan de Brouckére, bahwa „demokrasi” sekarang itu sebenarnya adalah suatu kapitalisme, suatu kapitalistische instelling, suatu blok bagi dictatuur van het kapitalisme! Demokrasi demikian itu harus kita lemparkan kedalam udara, — djauh dari angan² dan keinginan massa! Bagaimana dan demokrasi jang harus dituliskan atas bendera kita, — jang harus kita adakan diselang djembatan-emas? Demokrasi kita haruslah demokrasi baru, demokrasi sedjati, demokrasi jang benar-benarnya pemerintahan Rakjat. Bukan „demokrasi” á la Eropah dan Amerika jang hanja suatu „portret dari pantatnja” demokrasi politik radja, bukanpun demokrasi jang memberi kekuasaan 100% pada Rakjat didalam urusan politik radja, tetapi suatu demokrasi politik dan ekonomi jang memberi 100% ketjakrawatian pada Rakjat-tata didalam urusan politik dan urusan ekonomi. Demokrasi politik dan ekonomi inilah satu²nja demokrasi jang boleh dituliskan diatas bendera kita, — ditulis dengan aksara²-api sebagai diatas katakan, agar supaja gejala-nyala tertampak terang dan sawah dan bingkil dan paberik di atas Marhaen berkeluh-kesah mandi keringat mensesuai nasi.

Dengan demokrasi-politik dan demokrasi-ekonomi maka nanti diseberangnja djembatan-emas masyarakat Indonesia bisa diatur oleh Rakjat sendiri damai selamat, — dibikin mendjadi suatu masyarakat tiada kapitalisme dan imperialisme. Dengan demokrasi-politik dan ekonomi itu, maka nanti Marhaen bisa mendirikan staat Indonesia jang tulen tulenja Rakjat, — suatu staat jang segala urusannya politik dan ekonomi adalah oleh Rakjat, dengan

Rakjat, bagi Rakjat. Bukan sistim feodalisme, bukan sistim mengagungkan radja, bukan sistim constitutioneel monarchie jang walau memakai parlemen toch masih memakai radja, bukanpun sistim republik jang sebagai di Perantjis-sekarang atau di Amerika sekarang jang sebenarnya suatu sistim-republik daripada „demokrasinja” kapitalisme, — tetapi sistim politik-economische republik jang segala-galanja tunduk kepada ketjakrawartian Rakjat. Urusan politik, urusan diplomasi, urusan onderwijs, urusan bekerdja, urusan seni, urusan cultuur, urusan apa sahadja dan terutama sekali urusan ekonomi haruslah dibawah ketjakrawartian Rakjat itu: Semua perusahaan²-besar mendjadi miliknja staat, — staatnja Rakjat, dan bukan staatnja burdjuis atau ningrat —, semua hatsil² perusahaan² itu bagi keperluan Rakjat, semua pembahagian hatsil itu dibawah pengawasan Rakjat. Tidak boleh ada satu perusahaan lagi jang setjara kapitalistis mengemukakan kantong seseorang burdjuis ataupun mengemukakan kantong burgerlijke staat, tetapi masyarakatnja Politiek-Economische Republik Indonesia adalah gambarnya satu kerukunan Rakjat, satu pekerdjaan bersama daripada Rakjat, satu kesama-rasa-samarataan daripada Rakjat.

Inilah demokrasi-sedjati jang kita tjita-tjitakan, dan jang saja sebutkan dengan nama-baru sosio-demokrasi. Inilah demokrasi-tulen jang hanja bisa timbul dari nasionalisme Marhaen, dari nasionalisme jang didalam bathinnja sudah mengandung ke-Rakjatan-tulen, jang anti tiap² matjam kapitalisme dan imperialisme walaupun dari bangsa sendiri, jang penuh dengan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan jang menolak tiap² sifat keburdjuisan dan keningratan, — nasionalisme ke-Rakjatan jang saja sebutkan pula dengan nama baru sosio-nasionalisme. Hanja sosio-nasionalisme bisa melahirkan sosio-demokrasi, nasionalisme lain, tidak bisa dan tidak akan melahirkan sosio-demokrasi. Siapa jang berkemak-kemik „sosio-demokrasi”, tetapi dadanja masih berisi sifat² keburdjuisan atau keningratan walau sedikit-pun djua, — ia adalah seorang munafik jang bermuka dua!

Nasionalisme partai-pelopor hanjalah boleh satu: Sosio-nasionalisme, dan tidak lain! Lemparkanlah djauh² nasionalisme-keburdjuisan dan nasionalisme keningratan, bantingkanlah mendjadi debu nasionalisme keburdjuisan dan nasionalisme keningratan itu diatas siti buntalannya ke Rakjatan massa! Pembatja belum tahu nasionalisme-keburdjuisan, belum mengerti nasionalisme-keningratan? Amboi, masih banyak sekali orang² diantara nasionalisten kita, jang saban hari bertjita-tjita” „menasionalismekan” negeri kita mendjadi „negeri besar” seperti Djepang atau Amerika atau Inggeris, kagum melihat armadannya jang ditakuti dunia, kota-kotanja jang heibat, bank-banknja jang tersebar diseluruh dunia, benderanja jang berkibar diman-mana, kagum ingin moga² negeri Indonesia kelak djuga mendjadi „Negeri besar” sematjam itu. Ach, ini kaum nasionalis — burdjuis! — mereka tak terkena hati bahwa

barang jang dinamakan heibat² itu adalah hatsilnja kapitalisme, alat-alatnja kapitalisme, dan bahwa Rakjat-djelata dinegeri-negeri jang disebutkan „negeri djempol” itu adalah tertindas dan sengsara. Memang mereka punja nasionalisme bukanlah nasionalisme kemanusiaan, bukan nasionalisme jang ingin keselamatan massa, mereka punja nasionalisme adalah nasionalisme burdjuis jang paling djauh hanja ingin Indonesia-Merdeka sahadjja, dan tidak mau merobah susunan masjarakat sesudah Indonesia-Merdeka. Mereka bisa djuga revolusioner, tetapi burdjuis-revolusioner, tidak Marhaenistis-revolusioner tidak sosia-revolusioner,!¹).

Dan nasionalisme-keningratan? Haha, itu djuga masih banjak sekali pengikutnja. Mereka pengikut nasionalisme ini memang biasanja kaum ningrat, jang darahnja ningrat adatnya ningrat, hatinja ningrat, segala djasmani dan rochaninja ningrat. Mereka masih hidup didalam keadatan feodalisme, a n g l e r didalam tradisi feodalisme, jang m e r e k a mendjadi „kepala-kepalanja” Rakjat, dan m e r e k a mendjadi „pohon beringin” jang melindungi Rakjat. Mereka biasanja setia sekali pada kaum pertuanan, setia sekali pada kaum jang diatas, — och, djuga dizaman feodalisme mereka setia-tuhu kepada Sang Nata —, tetapi ada diantara mereka jang ngalamun Indonesia-Merdeka. Tetapi menurut tjita-tjitanja, didalam Indonesia-Merdeka itu m e r e k a-lah jang harus mendjadi „kepala”, m e r e k a-lah jang tetap harus mendjadi kaum jang memerintah, m e r e k a !, jang sedjak zaman purbakala, sedjak feodalisme-Hindu dan sedjak feodalisme ke-Islam-an toch sudah mendjadi „pohon beringin” jang melindungi kaum „kawulo”.

Awas, kaum Marhaen, awas dengan nasionalisme-keburdjuisan dan nasionalisme-keningratan itu! Ikutilah hanja itu partai sahadjja jang benderanja menjala-njala dengan sembojan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, teriakkanlah sembojan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi itu dengan suara jang mendengarkan-menggetarkan langit, gemuruh sebagai guruhnja guntur. Dengungkanlah sampai melintasi tanah-datar dan gunung dan samodra, bahwa Marhaen diseberangnja djembatan-emas akan mendirikan suatu masjarakat jang tiada keningratan dan tiada keburdjuisan, tiada kelas-kelasan dan tiada kapitalisme.

Dan bukan sahadjja mendengarkan suara! Partai-pelopor harus dari kini mendidik massa itu kedalam „prakteknja” sosio-demokrasi dan sosio-nasionalisme, „menjadiakan” massa untuk laksananya djandji sosio-demokrasi dan sosio-nasionalisme. Partai-pelopor harus dari kini sudah menebar-nebarkan benih kesama-rata-sama-rasaan didalam kalbunja massa, menebar-nebar-pula benih „gotong-rojong” didalam hatinja massa, agar supaja massa jang berabad-abad kena penyakit individualisme²) itu, sudah dari kini mulai mendjadi „manusia baru” jang merasa dirinja „manusia masjarakat” jang sela-

1) Buat arti „revolusioner” lihatlah saja punja pleidooi.
2) Individualisme = perseorangan diri.

manja mementingkan keselamatan umum.

Partai-pelopor harus mendidik teorinja dan praktiknya „kemasjarakatan” itu dengan tak djemu² nundjukkan kedjahatan individualisme, membongkar kedjahatan kapitalisme, mengandjurkan memfiilkan pekerdjaan bersama, mendirikan mendjalankan koperasi² jang radikal, mendirikan dan memperdjoangkan vakhond² dan sarekat² radikal, — terutama koperasi-radikal, vakhond radikal, sarekat tani radikal! —, pendek-kata m sekarang dengan tjara radikal mendjelmakan manusia-masjarakat didalam tiap² perdjoangan didalam tiap² sepak-terdjangnja, didalam politiknja.

Strijdprogram dan staatprogram partai-pelopor harus strijdprogram staatprogramnja Manu masjarakat, strijdprogram dan staatprogram haruslah suatu oorlogsverklaring alias penantang perang kepada segala matjam individualisme. Setiap azasnja partai, segala azas-perdjoangannya pada segala taktiknja partai, segala perdjoangannya pada — perdjoangan mendatangkan Indonesia-Merdeka, perdjoangan memberantas aturan² jang djelek, perdjoangan buat perbaikan²-ini-hari d.l.s. —, setiap gerak-bangkit djasmani dan rochaninja partai haruslah suatu hantaman kepada individualisme, suatu malapetaka kepada individualisme, — urut keprabon Insan Manusia-masjarakat.

Bahagialah partai-pelopor jang demikian itu!

Bahagialah massa jang dipelopori partai jang demikian itu!

Hiduplah sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi!

10. MENTJAPAI INDONESIA-MERDEKA

Sekarang, kampiun² kemerdekaan, madjulah muka, susunlah pergerakanmu menurut garis² jang saja guratkan didalam risalah ini. Heibatkan partainja Marhaen, agar supaja mendjadi partai-pelopornja massa. Hidupkanlah semua semangat jang ada didalam dadamu, heibatkanlah semua ketjaka-pengorganisasi jang ada didalam tubuhmu, heibatkanlah semua keberanian banteng jang ada didalam njawamu tumpahkanlah semangat dan ketjaka-pengorganisasi dan keberanian-banteng itu kedalam tubuhnja partai, tumpahkanlah kelaki-lakian itu kedalam badannja massa, agar supaja massa secepat olah ketitisan kembali oleh segala kelaki-lakian dari zaman sediakala, ketitisan pula oleh kelaki-lakian baru daripada moderne massa-aksi. Kalahkan kampiun-kampiunnja pena, gerakkanlah penamudjadjam udjung Djemparingnja Rama, kamu kalahkan organisator, susunlah bentengnja harapan Rakyat mendjadi benteng jang menahan gempa, kalahkan kampiun²nja mimbar, dengungkanlah suaradengmu hingga menggetarkan udara. Tumpahkan segenap djiwa-ragamu kedalam partainja massa. Tumpahkanlah segenap djasmani dan rochanimu kedalam perdjoangannya massa, tumpahkanlah segenap njanjimu mendjadi api-kesedaran dan api-kemauan massa.

Hidupkanlah massa-aksi, untuk mentjapai Indonesia-Merdeka!



Pramuka, tunas harapan bangsa dimasa datang, tampak berbaris dengan rapi dan disiplin.

Presiden/Pramuka Agung sedang memeriksa barisan Pramuka.



Rakyat ibukota setelah mendengarkan Amanat „Takari”, serta menyaksikan upatjara² chidmat lainnja, dengan rasa puas menudju pulang ketempatnja masing².



Monumen Nasional, diwaktu malam. (foto : Deppen)

Unit Khusus "KARYA TJOTAS" Djakarta

WARTA



RECEIVED

NOV 11 1966

STATE ARCHIVES LIBRARY

AP
W299
P433
18
11

Perdagangan



TAHUN KE - XVIII

1965

MADJALAH

„WARTA PERDAGANGAN”

Terbit tiap 2 Minggu sekali

Diterbitkan oleh :

Departemen Perdagangan Dalam Negeri beserta Urusan Perdagangan Luar Negeri dari Kompartimen Luar Negeri/H.E.L.N. dan Perdagangan Luar Negeri.

Pelindung :

J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/
Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri
BRIG. DJENDERAL A. JUSUF.

Penasehat :

1. Pembantu Utama Kuasa Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri
S O E D I R O M.A.
2. Pembantu Utama Menteri Perdagangan Dalam Negeri
Prof. Dr. ARIFIN ABDURACHMAN.

Pemimpin Umum :

Kepala Direktorat Marketing dan Research:
Ir. J.J. Pitoy M.A.

Staf Redaksi :

Staf Direktorat Marketing dan Research.

Penanggung Jawab :

Kepala Seksi Publikasi Madjalah
Anwar B. Harahap.

Pembantu, Tetap :

Prof. Ir. Teko Sumodiwirjo — Kolonel Jusuf Ramli — Major A. Rachman Rukmantara — R. Hertatyanto S.H. — Drs. Waskito — Dr. J. Panglaykim.

Pembantu Khusus :

Budhiman B.A. — Kolonel Usman Ismail — Alamsjah S.B.P. — R. H. Tuwaidan M.A. — Drs. Sjaaf Muchtar — Major Drs Sukadjat — R. Isa — Drs A. Aidit — Suprpto — Sudjadi — A. Karim Usman S.H. — Dudy Djaya.

Alamat Redaksi dan Tata Usaha :

Madjalah „WARTA PERDAGANGAN”
Direktorat Marketing dan Research
Djalan Tanah Abang Timur No. 87
D J A K A R T A

Pelaksana/Pertjetakan :

Kepala Pertjetakan P.N. Karya Tjotas
Burdi Reksodirdjo.

Daftar Isi

1. Kikis habis inflasi dalam waktu setahun ...	1
2. Komando operasi Berdikari (Kotari)	2
3. Ketentuan ² yang perlu segera dilaksanakan dalam rangka usaha Berdikari	4
4. Pro Bono Publico	6
5. P.N.N. adalah milik kita semua	11
6. Sampal ketemu lagi (Adjaran Pemimpin Besar Revolusi)	11
7. Ketentuan ² pelaksanaan S.K.B. Menteri UBS dan Menteri Perdagangan D.N./Kuasa Menteri Perdag-Luar Negeri No. Kep. 68/UBS/65	16
8. Delegasi wewenang Menteri UBS kepada BLLD untuk menilai dan memutuskan denda pembatalan K.V.E.	17
9. Pembebanan barang penumpang dan kiriman yang dimasukkan tidak atas beban Dana Devisa	18
10. Pemungutan retribusi impor atas impor barang yang dibijai dengan devisa pelengkap	21
11. Varia berita singkat ekonomi/perdagangan international	22
12. Varia berita singkat ekonomi/perdagangan Dalam Negeri	27
13. Pengumuman ² Departemen Perdagangan ...	31
14. Memperkenalkan Uganda	32
15. Ketentuan ² Pelaksanaan Undang ² Devisa Tahun 1964 d.lbidang efek-efek	35
16. Peraturan Retribusi BLLD untuk Devisa Pelengkap	40
17. Tjek-tjek yang hilang	40

Keterangan gambar kulit muka :

Menteri Perdagangan Brigdjen A. Jusuf beserta rombongan setibanja dilapangan terbang Adisutjipto Jogjakarta, dalam rangka mengundjungi serta menindjau ke Pekan Raya Dwidawasarsa dan Pabrik P.T. Margoredjo pada tgl. 19-8-'65 j.l.

Pembayaran uang langganan dilakukan dimuka dengan

1. Penjetoran atas Rekening Madjalah „Warta Perdagangan” Kode No. : P.W.A.-194, pada Bank Indonesia — Djl. : Thamrin, Djakarta.
2. Dinas Giro dan Tjek Pos atau dengan pos wissel yang langsung dialamatkan kepada Tata Usaha Warta Perdagangan Direktorat Marketing dan Research.

Surat Izin Terbit no.: 00231/R/SK/DPHM/ST tgl. 3 - 9 - 1965.

KIKIS HABIS INFLASI DALAM WAKTU SETAHUN.

Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno menegaskan bahwa bahan² untuk berdikari Indonesia sangat me-limpah² dan bila kita mau mengolah dan bisa mengaturnya apa jang dinamakan inflasi tentu akan dapat teratasi dalam waktu 1 tahun.

Dalam huf-ungan itu pada kesempatan melantik Kepala Staf dan Pimpinan Bidang² dalam Staf Komanlo Berdikari (KOTARI) di Istana Bogor pagi tanggal 5 September 1965 Presiden telah menginstruksikan kepada Lembaga jang tersebut untuk memeras keringat dan otak hebat-hebatnja guna dapat mengikis habis dalam waktu setahun apa jang dinamakan inflasi tersebut.

"Kerdjakanlah perintah saja ini, djangan henknja kita djadi bangsa tergantung. Peras has²-an keringat dan otak saudara sebagaimana kita harapkan kepada para sardjana pada resepsi HSI baru² ini, untuk mewujudkan berdikari total, terutama berdikari dalam bidang ekonomi", demikian Presiden.

Adapun pedjabat² jang dilantik Minggu pagi sebagai Pimpinan KOTARI adalah Menteri Perdagangan D.N./Kuasa Menteri Perdagangan D.N. Brigdjen Achmad Jusuf sebagai Kepala Staf KOTARI merangkap sebagai pimpinan bidang perdagangan, Menteri UBS Jusuf Muda dalam sebagai pimpinan bidang keuangan, Menteri Negara Drs. Achmad Sukendro sebagai pimpinan bidang prasarana, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Brigdjen M. Jusuf sebagai pimpinan bidang produksi, dan Menteri Penerangan Majdjen Achmad sebagai pimpinan bidang mass-media.

Berdikari bukan khusus untuk tahun '65.—

Pada awal amanat pelantikannya Presiden Sukarno menjatakan, bahwa disamping mempu² Lembaga² seperti KOTI dan KOTOE, kini kita memiliki KOTARI untuk melaksanakan ansip berdikari.

Didjelaskannya, bahwa djudul "Tahun Berdikari dari amanat "Tjapailah Bintang² Dilangit" g diutjapkan pada 17 Agustus jbl. sebenarnya jang tepat, dan mestinja harus dirobah sedimendjadi "Tahun Permulaan Berdikari" atau Tahun Mulainya Berdikari". Ini dikarenakan berdikari bukan khusus atau khusus untuk tahun '65 sadja, tapi bahkan untuk tahun² berikutnya.

Ingatkannya kembali, bahwa mahkota kemerdekaan tidak terletak pada keanggotaan PBB, melainkan pada berdikari. Oleh karena itu negara jang tidak berdikari tidak mempunyai ke-

merdekaan penuh dan sedjati. Kemerdekaan adalah tudjuan kita seterusnya, sedang tahap terakhir jang kita tudju adalah merdeka dengan isi masyarakat adil dan makmur atau Sosialisme. Kini kita sedang dalam tahap nasional demokratis dan sedang menudju serta sedang mulai membangun tahap Sosialisme. Didjelaskan oleh Presiden, bahwa Sosialisme hanya bisa terdapat dalam alam kemerdekaan. Sosialisme tanpa berdikari dan dalam alam jang tidak merdeka sepenuhnya adalah sosialisme-sosialisme. Sedang tudjuan kita tidak hanya mempertahankan dan mengabdikan kemerdekaan, tetapi djuga mengisinja dengan sosialisme, maka berdikari bukan hanya khusus dan khusus tahun ini sadja, melainkan djuga untuk tahun² berikutnya.

Tri Sakti diperas djadi berdikari total.—

Selanjutnya Presiden mengingatkan akan amanatnya pada resepsi HSI baru² ini, bahwa berdikari jang ditudju bukan hanya dibidang ekonomi sadja, tetapi adalah berdikari disegala bidang.

Dikatakannya, bahwa bidang ekonomi tidak bisa "uwal" (terlepas dari) dari bidang politik dan kebudayaan, demikian djuga sebaliknya. Dalam hal ini Presiden mengemukakan tjontoh sesuatu negara jang dibidang ekonominya mengabdikan kepada kepentingan Amerika Serikat, maka politik luar negerinya terikat sama sekali, sedang dibidang kebudayaan menundukkan gejala² dekadensi sebagaimana jang terdapat di negara imperialis tersebut.

Ditegaskan oleh Presiden, bahwa isi jang mendalam daripada Tri Sakti Tavip adalah berdikari dalam segala bidang. Oleh karena itu Tri Sakti kalau diperas mendjadi satu akan berubah mendjadi berdikari total.

"Dus, kita jang ingin mendjadi bangsa besar harus berdikari disegala bidang, terutama dibidang ekonomi", demikian Bung Karno jang menjatakan selanjutnya, bahwa tugas jang dibebankan dipundak pimpinan KOTARI adalah berat, yakni selekasnja melaksanakan berdikari, terutama dibidang ekonomi.

Ditandaskannya, bahwa bahan² untuk berdikari di Indonesia sangat melimpah-limpah, dan bila kita mau mengolahnja dan dapat mengaturnja, maka apa jang dinamakan inflasi akan dapat dikikis habis dalam waktu setahun. Oleh karena itu Presiden mengachiri amanatnya dengan memerintahkan kepada KOTARI untuk memeras keringat dan otak guna mengikis habis dalam waktu setahun apa jang dinamakan inflasi tersebut. (Antara)

KOMANDO OPERASI BERDIKARI

(KOTARI)

PEMBENTUKAN KOMANDO OPERASI BERDIKARI

Keputusan Presiden Republik Indonesia
No. 256 Tahun 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

Bahwa sebagai kelanjutan daripada Amanat Presiden/Pemimpin Besar Revolusi pada tanggal 17 Agustus 1965 yang berjudul Tahun Berdikari (TAKARI) perlu segera membentuk suatu komando tersendiri;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
2. Amanat Politik di depan Pembukaan Sidang Umum MPRS ke-III tanggal 11 April 1965;
3. Keputusan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. VI/MPRS/1965 tanggal 16 April 1965;
4. Amanat 17 Agustus 1965 tentang Tahun Berdikari (TAKARI).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Pertama: Membentuk Komando Operasi Berdikari yang disingkat "KOTARI";

Kedua: KOTARI mempunyai tugas untuk melaksanakan pembangunan ekonomi atas dasar berdiri diatas kaki sendiri;

- Ketiga:**
1. KOTARI langsung dipimpin oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi;
 2. KOTARI dibantu oleh seorang Kepala Staf;
 3. KOTARI beranggotakan:
 - a. Para Wakil Perdana Menteri;
 - b. Para Menteri Koordinator dan Menteri-Menteri yang bersangkutan;

4. Organisasi, susunan dan tanggungjawab KOTARI akan ditentukan kemudian;

5. Badan-badan Pelaksanaan KOTARI adalah Departemen-Departemen dan Badan² Pemerintah/Negara yang ada dan tidak membentuk badan-badan baru;

Keempat: Keputusan ini, berlaku mulai sejak tanggal dikeluarkannya.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 2 September 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUKARNO

PENGANGKATAN KEPALA STAF KOMANDO OPERASI BERDIKARI

Keputusan Presiden Republik Indonesia
No. 257 Tahun 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas KOTARI dipandang perlu untuk mengangkat orang Kepala Staf KOTARI;

b. bahwa Brigadir Djenderal Achmad Jusuf, Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri, dianggap tepat untuk memimpin Staf KOTARI;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 256 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Terhitung mulai ditetapkannya surat keputusan ini, mengangkat

Brigadir Djenderal TNI. **ACHMAD JUSUF**,
Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri
Perdagangan Luar Negeri, sebagai **KEPALA STAF KOTARI**.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 September 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO



**STAF INTI/STAF KOMANDO
OPERASI BERDIKARI**

Keputusan Presiden Republik Indonesia
No. 258 Tahun 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

Bahwa untuk melantjarkan tugas Komando Operasi Berdikari, perlu dibentuk suatu Staf yang dapat membantu Kepala Staf Komando Operasi Berdikari dalam melaksanakan tugasnya.

Bahwa Staf Komando Operasi Berdikari harus dapat merumuskan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan pelaksanaan pembangunan ekonomi atas dasar berdiri diatas kaki kita sendiri.

Mengingat:

pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar;

Amanat 17 Agustus 1965 tentang Tahun Berdikari (TAKARI);

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 256 dan No. 257 Tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Tema : 1. Untuk membantu Kepala Staf Komando Operasi Berdikari dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibentuk suatu Staf Inti yang terdiri atas 5 (lima) Unsur, jaitu :

- a. Bidang Keuangan;
- b. Bidang Prasarana;
- c. Bidang Produksi;
- d. Bidang Perdagangan;
- e. Bidang Mass Media;

yang harus merumuskan kebidjaksanaan pelaksanaan pembangunan ekonomi atas dasar berdikari dalam bidangnya masing-masing dalam rangka keseluruhan kebidjaksanaan pelaksanaan pembangunan ekonomi berdikari.

2. Untuk membantu Kepala Staf dan Staf Inti dalam melaksanakan segala tugas dan kegiatannya dibentuk sebuah Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kedua : 1. Masing-masing bidang dikepalai/dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab kepada Kepala Staf Komando Operasi Berdikari.

2. Kepala Staf Komando Operasi Berdikari langsung bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

Ketiga : 1. Pimpinan dari masing-masing bidang tersebut PERTAMA diatas diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

2. Sekretaris Staf Komando Operasi Berdikari diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia atas usul Kepala Staf Komando Operasi Berdikari.

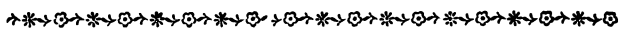
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai hari tanggal dikeluarkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 3 September 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.



**PENGANGKATAN PIMPINAN-PIMPINAN
BIDANG-BIDANG DALAM STAF KOTARI**

Keputusan Presiden Republik Indonesia
No. 259 Tahun 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : Bahwa untuk mensukseskan tugas Staf Komando Operasi Berdikari perlu segera mengangkat pimpinan bidang² dalam Staf KOTARI;

Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 256 jo 258 tahun 1965;

Bersambung ke hal. 5

Ketentuan² jang perlu segera dilaksanakan, dalam rangka usaha BERDIKARI disemua bidang, Chususnja dibidang Ekonomi.

1. Mobilisasi dinamik Prakarsa dan daya kreasi seluruh rakyat, baik jang dikuasai oleh ORMAS, ORPOL, Golongan Karyawan maupun jang tidak terorganisir, harus ditunjukkan dan dipakai untuk mendukung pelaksanaan kebidjaksanaan umum KOTARI dalam rangka usaha BERDIKARI disemua bidang, chususnja dibidang ekonomi
2. Pengamanan dalam pelaksanaan kebidjaksanaan umum KOTARI harus dijamin oleh alat² Negara dalam semua tingkatan, chususnja oleh Angkatan Bersendjata.
3. KOTARI dan KOTOE harus mengadakan koordinasi jang se-baik²nja, dengan ketentuan bahwa : KOTOE adalah confrontasi-sentris dan KOTARI adalah National-sentris.
4. Dewan² jang telah ada supaja masing² tidak merupakan „decision centre”, tetapi harus menjalurkan hasil² usahanya sebagai nasihat kepada P.J.M. Presiden untuk seterusnya dituangkan dalam bentuk keputusan KOTARI; hal ini dimaksud untuk mentjegah kesimpang-siuran dalam penentuan kebidjaksanaan² umum dibidang ekonomi jang dapat mengakibatkan berkembangnja birokrasi dan menimbulkan kebingungan pada para pelaksana. Dewan² jang dianggap tidak perlu lagi dalam keadaan sekarang, harus dibubarkan.
5. Hubungan antara Pusat dan Daerah didalam memberikan instruksi² dibidang ekonomi harus ditertibkan.
6. Para Menteri jang bertugas dalam sektor ekonomi/keuangan harus dengan segera mereorganisir Departemen masing² agar dapat mentjapai dajamampu dan dajaguna demi untuk pelaksanaan kebidjaksanaan² umum daripada KOTARI. Proses peremadjaan dan retooling berdasarkan keputusan Presiden harus setjara konsekwen dan dengan penuh tanggungjawab dilaksanakan.
4. Melepaskan diri dari penetapan dari luar atas nilai Rupiah terhadap valuta asing :
 - menilai kembali dajabeli Rupiah sekonkrit²nja;
 - system S.P.P. harus ditinjau kembang setjara fundamental;
 - hasil Devisa sepenuhnya diadministrasikan dan ditetapkan penggunaannja oleh Negara.
5. Kebidjaksanaan dalam pemberian kredit harus tertib dan terarah.

II. BIDANG PRODUKSI.

1. Proteksi terhadap bidang produksi harus dilaksanakan setjara konsekwen; rongrongan dalam segala bentuk dan dengan dalih apapun harus dilenjangkan.
2. Penggunaan alat² produksi jang telah ada harus se-efisien²nja, sehingga mentjapai kapasitas produksi se-tinggi²nja. Karena itu segala daya dan dana harus ditunjukkan untuk keperluan produksi baik industri maupun agraria.
3. Pembinaan antara konsentrasi kekuatan dan kekayaan alam didaerah harus dipertinggi dan daerah dijadikan dasar utama karena pada hakekatnja ekonomi kita mentjajai basis pelaksanaannja didaerah.
4. Mengikutsertakan hasil² industri dalam export drive, supaja dalam waktu singkat Indonesia sudah dapat mengekspor „finished products” kepasarannya dunia umumnya chususnja kepasarannya NEFOS.

III. BIDANG KOMUNIKASI.

1. Gangguan² jang bersifat birokrasi, politis, dan psikologis harus segera dilenjangkan.
2. Dengan kekuatan dan alat² jang telah ada harus ditjapai dajaguna jang optimum; dalam hal ini bukan mentjari penyelesaian dengan perluasan tetapi dengan pemakaian jang lebih efisien daripada alat² jang ada dan pemeliharaannja jang lebih baik.
3. **Prasarana**, dengan mengikutsertakan daya masyarakat, jang telah ada harus diperbaiki dan dipelihara, jang belum ada harus diperkembangkan.

KETENTUAN² JANG PERLU SEGERA DILAKSANAKAN

I. BIDANG MONETER/KEUANGAN.

1. Meningkatkan penghasilan Negara.
2. Re-adjustment subsidi² jang tidak perlu, atas dasar „Cost Accounting”.
3. Meninjau kembali „tax-system” setjara fundamental.

BIDANG PERDAGANGAN.

1. Ekspor harus dipertinggi dengan menggali commodities jang baru dan memperdagangkannya dengan usaha mentjapai harga penjualan jang setinggi²nja.
2. Upgrading dan processing daripada hasil pertanian rakjat harus diusahakan setjara optima, agar dalam waktu singkat dapat mengekspor hasil² jang consumer's ready (tidak lagi dalam bentuk bulk seperti sekarang).
3. Setjara ber-angsur² diusahakan sebanjak mungkin ekspor dari sterke producten dilaksanakan oleh P.N.N.
4. Impor ditudjukan khusus untuk kepentingan sektor produksi dan komunikasi; barang² impor untuk konsumsi harus dihentikan. Impor seluruhnja dikuasai Pemerintah dalam tahun 1966. Pelaksanaannya diserahkan kepada P.N.N.; bilamana keseluruhannya belum dapat terlaksana, swasta dalam bentuk organisasi semi Pemerintah akan diikutsertakan.

V. BIDANG MASS-MEDIA.

1. T.V., Press, Radio harus setjara konsekwen mengusahakan social support, social participation, social responsibility, social control dengan djalan memberikan pengertian² jang djelas.
2. Penerangan² jang merupakan hasutan² dan rongrongan harus dihentikan.

VI. LAIN-LAIN.

1. Setiap keputusan atau peraturan kebidaksanaan jang dikeluarkan oleh KOTARI untuk mentjapai BERDIKARI disegala bidang, chususnya dibidang ekonomi, harus dilaksanakan dengan penuh kesetiaan dan tanggungjawab terhadap P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi.
2. Terhadap setiap tindakan jang merupakan penjelewengan atau sabotage atas ketentuan² tersebut harus diambil tindakan sesuai dengan ketetapan hukum, demi untuk memelihara kewibawaan Pemerintah dalam bidang ekonomi chususnya.

Demikian pokok-pokok Instruksi P.J.M. Presiden dalam rapat paripurna Kabinet Dwikora.

Djakarta, 14 September 1965.

ambungan dari hal. 3).

MEMUTUSKAN :

ditetapkan :

Perhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini, diangkat :

Jusuf Muda Dalam Menteri Urusan Bank Sentral, untuk memimpin BIDANG KEUANGAN Staf Komando Operasi Berdikari;

Brigadir Djenderal T.N.I. Drs. H. Achmad Soekendro Menteri Kepala Staf Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, untuk memimpin BIDANG PRASARANA Staf Komando Operasi Berdikari;

Brigadir Djenderal T.N.I. Mohd. Jusuf Menteri Perindustrian Ringan, untuk memimpin BIDANG PRODUKSI Staf Komando Operasi Berdikari;

Brigadir Djenderal T.N.I. Achmad Jusuf Menteri Perdagangan Dalam Negeri & Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri untuk memimpin BIDANG PERDAGANGAN Staf Komando Operasi Berdikari;

Major Djenderal Achmadi Menteri Penerangan, untuk memimpin BIDANG MASS MEDIA Staf Komando Operasi Berdikari.

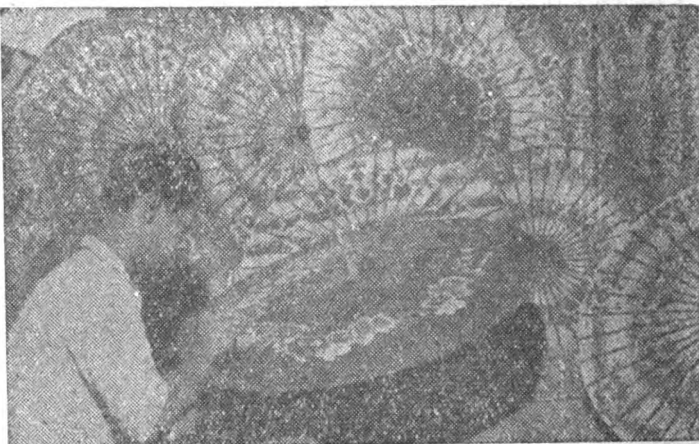
Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 3 September 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.



Membuat lukisan diatas pajung memerlukan tehnik dan seni tersendiri jang disesuaikan dengan selera konsumen.

PRO BONO PUBLICO

DAN

BERDIKARI DIDALAM BIDANG EKONOMI

Laporan perdjalan Jang Mulia Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri Brigdjen AHMAD IUSUF dan Ibu Menteri dan Rombongan ke Pekanbaru Dwidawasarsa R.I. di Jogjakarta dan Penindjauan ke Pabrik P.T. Margoredjo. (Disusun oleh N.M.F. Sinjal, Press. Officer Dep. Perdag).

Pada tanggal 19 Agustus 1965, djam 10.15 pagi J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Perdagangan Luar Negeri beserta Ibu Menteri dan rombongan meninggalkan lapangan terbang KEMAJORAN — Djakarta menudju Jogjakarta. Tiba di lapangan terbang ADISUTJIPTO — Jogjakarta pada djam ± 12.45 dimana J.M. Menteri Perdagangan beserta Ibu Menteri dan rombongan disambut antara lain oleh Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta baik sipil maupun militer, Perwakilan Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri, Tjabang-tjabang Perusahaan-perusahaan Niaga Negara (P.N.N.) Jogja, dan Semarang serta para Direksi P.T. MANTRUST.

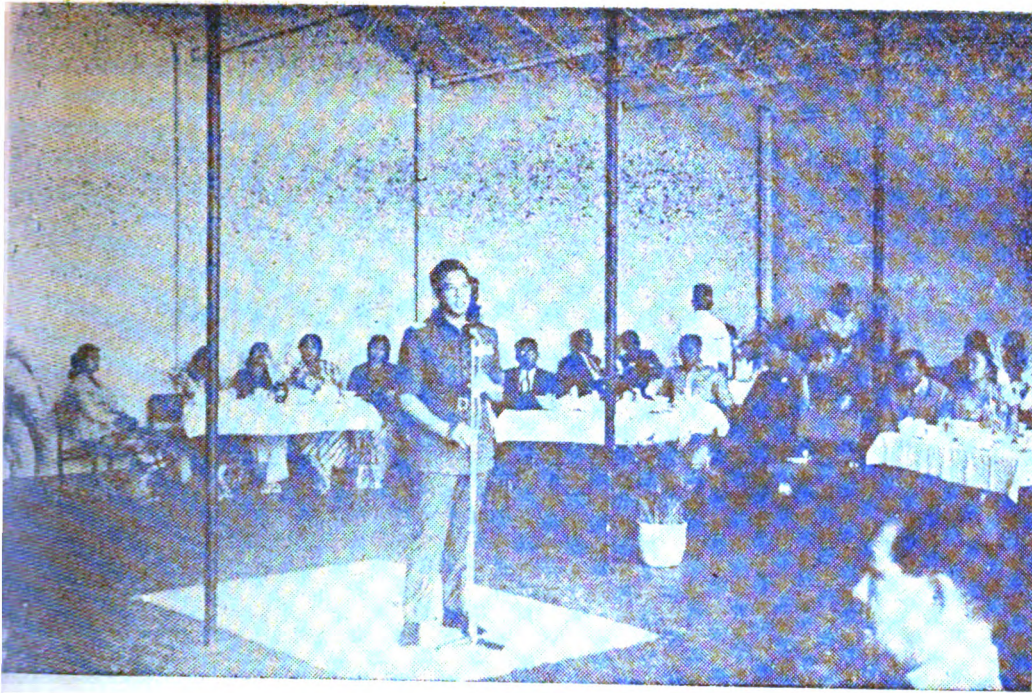
Setelah upatjara penerimaan J.M. Menteri Perdagangan beserta Ibu Menteri dan rombongan kemudian menudju VIP-room sebelum melandjutkan perdjalan/penindjauan ke Pabrik P.T. MARGOREDJO. Djam 13.00 perdjalan dilandjutkan ke Margoredjo: penjambutan meriah diberikan oleh para Direksi, Karyawan serta seluruh pegawai P.T. Margoredjo dengan iringan lagu-lagu gembira oleh sebuah band setempat. Kemudian penindjauan dalam pabrik dilakukan beserta para Direksi P.T.

MANTRUST dan J.M. Menteri merasa sangat bangga akan hasil jang ditjapai oleh P.T. Margoredjo sebagai pengeksport "corned beef" dan ekspor daripada pelaksanaan doktrin "BERDIKARI" karena industrilah jang mendjadi tulang punggung ekonomi kita.

Djam 13.45 rombongan menudju ke kantin P Margoredjo. Atjara selandjutnja adalah kata sambutan dari Direktur Utama P.T. Mantrust jang terlebih dahulu mengutjapkan terimakasih jang besar-besarnja atas kehadiran J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri jang telah meluangkan waktu untuk mendjau Pabrik P.T. Margoredjo dan nanti akan menghadiri upatjara penjerahan "corned beef", eksp pertama setjara simbolis kepada Ibu Pertiwi sebagai tanda pendharma-baktian kepada Negara dan bangsa Indonesia. Selandjutnja dalam kata sambutan diuraikan dengan singkat organisasi P.T. Mantrust. MANTRUST adalah singkatan daripada Management Trust Company dan adalah kumpulan tenaga ahli (braintrust) jang dapat memudikan perusahaan-perusahaan jang ada dibaw lingkungannja antara lain P.T. Margoredjo. Dj setjara terpusat mengadakan penelitian, peren



Daja tjipta Rakjat perlu dipupuk dan diperkembangkan, dengan demikian hasil² industri ringan seperti bahan kuan dan kekajaan alam (kerang laut) gambar diatas dapat lebih dimanfaatkan kegunaannja.



J.M. Menteri Perdagangan Brigdjen A. Jusuf sedang memberi kata sambutan bertempat di Pabrik P.T. Margo-redjo.

...aan produksi, pendjualan, pembelian dan lain-lain. Selanjutnja mengenai organisasinja adalah disusunan menurut garis-garis organisasi ketentaraan dan staf fungsionil. Adalah mendjadi tudjuan daripada P.T. Mantrust bahwa setiap perusahaan jang didirikannja harus menguntungkan daerah dalam arti materi dan mental lagi pula harus merupakan pelopor dan mendjadi teladan untuk lingkungannja dalam tjara-tjara berproduksi setjara ilmiah dan djadi pelopor dan tjontoh dalam pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, terhadap lingkungan atau daerah dimana perusahaan didirikan.

Selanjutnja pihak Direksi mengutjapkan banjak terimakasih atas fasilita, kepertjajaan, kesempatan dan perhatian jang diberikan oleh Pemerintah kepada Mantrust setelah mengalami berbagai kesukutan, dalam hubungan ini disebut adanja surat perintah dari Panglima Komando Pembangunan Ekonomi Daerah Perbatasan jang pada dasarnya mengandung suatu kepertjajaan jang diberikan kepada Mantrust untuk membuktikan bahwa Mantrust dapat berdikari dibidang ekonomi dengan usaha export-drive dari hasil-hasil pabrik mereka. Sebagai hasil perdjuaan dan semangat Mantrust, maka pada tanggal 12 Djuli Mantrust telah berhasil membuka pula Pabrik Nanas di Tandjungpinang dan nanas dalam kaleng buatan Indonesia telah memasuki dan mulai mendapat peranan di pasaran dunia.

Sambutan jang kedua diberikan oleh Wakil Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta dimana beliau mengutjapkan terima-kasih kepada J.M. Menteri Brigdjen A. JUSUF atas kundjungan beliau ke daerah Istimewa Jogjakarta.

Sebagai penutup maka atas permintaan Direksi MANTRUST J.M. Menteri A. JUSUF memberikan kata sambutannya.

Adapun jang dikemukakan oleh beliau ialah penandasan-penandasan untuk melaksanakan doktrin P.J.M. Presiden Sukarno, jaitu doktrin "BERDIKARI". Kita harus menghilangkan sifat-sifat birokrasi, ambtenarij jang menjebakkan mismanagement karena ekonomi bukanlah soal administrasi, accountancy tetapi ekonomi adalah kegiatan-kegiatan jang diselaraskan dengan realita. Politik ekonomi zaman kolonial itu harus kita hilangkan; misalnja, dalam soal karet dan kopi kita mendjualnja keluar negeri sebagai bahan-mentah dimana djustru industri-industri diluar negeri jang memperoleh segala keuntungan sedangkan kesedjjahteraan buruh kita terbenkakai.

Dengan doktrin BERDIKARI itulah kita harus banting stir 100% mengingat akan hasil kekajaan alam Indonesia jang berlimpah-limpah serta potensi tenaga kerdja jang ada pada kita; kita harus memberi kesedjjahteraan kepada rakjat, chususnja kaum buruh didalam negeri dengan mengolah sendiri bahan-bahan mentah hasil kekajaan Indonesia untuk diekspor dalam bentuk barang djadi. Kita harus mengadakan upgrading dan processing dalam negeri sebelum didjual, untuk selanjutnja dapat menentukan hargannja serta mengatur pendjualannja. Export-drive jang sebesar-besarnja hannya dapat dilakukan dengan bekerdja dan berproduksi sehingga kita dapat menghentikan inflasi. Berhubung dengan usaha untuk memperbesar ekspor maka industri harus mendapat proteksi dan perhatian daripada Pemerintah. Kita harus bekerdja sesuai dengan ukuran Revolusi jaitu PRO BONO PUBLICO jang berarti bekerdja demi kepentingan masjarakat.

Bagi kita bangsa Indonesia mesin-mesin adalah pembantu manusia dalam melaksanakan produksi, sedangkan di Eropa orang-oranglah jang mendjadi pembantu daripada mesin-mesin. Djadi produksi

EKSPOR PRODUK NASIONAL BERMUTU

MEMPERTINGGI GENGGI NEGARA

Karena itu *mantrust*:

- memproduksi Corned Beef merk FORTUNA
yang ekspornja telah dilaksanakan.
- membangun pabrik pengawetan nanas ditengah² hutan dekat
GESEK (Kep. RIAU) dalam waktu 109 (seratus sembilan) hari
realisasi Projek Nanas Kopedasan, untuk produksi dan ekspor
nanas merk PARAMOUNT.

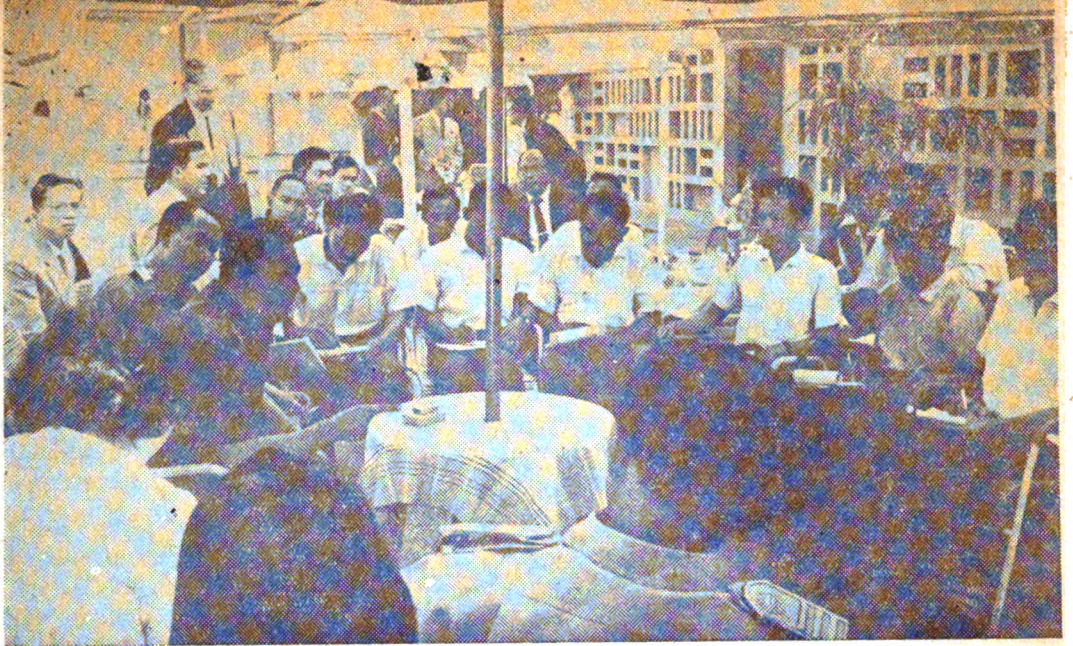
mantrust

Kantor Pusat : Dj. Halimun 22 Bandung — Tel. 4185-4186-5536

Perwakilan Djakarta : Dj. Raya Djatinegara Barat 124

Tel. 81335-81391-81392.

J.M. Menteri Per-
dagangan Brigdjen
A. Jusuf ketika
mengadakan kon-
ferensi pers de-
ngan para Warta-
wan dari Jogja,
Bandung, Semarang
dan Djakarta.



harus dilakukan oleh kita sendiri dengan dibantu oleh mesin-mesin. Dengan demikian maka kita akan memperoleh job vorming yang seluas-luasnja. Automatisering daripada mesin-mesin tidaklah perlu pada waktu sekarang ini. Selandjutnja beliau mendandaskan bahwa untuk mendjadi Pemimpin yang baik demi kepentingan masjarakat maka ia harus ber-VIVERE PERICOLOCO yang bertindak atas tanggung-djawab sendiri.

KONPERENSI PERS

Pada djam 13.00 sore J.M. Menteri BRIGDJEN A. JUSUF berkenan mengadakan koperensi pers dengan para wartawan dari Jogja, Bandung, Semarang dan Djakarta.

Dalam konperensi persnja, beliau memaparkan bahwa sesuai dengan doktrin Berdikari maka soal ekonomi kita harus banting stir 100% jaitu kita harus meninggalkan politik ekonomi zaman kolonial dengan menghentikan ekspor bahan-bahan mentah Indonesia, sebagai hasil kekajaan alam kita keluar negeri yang hanja menguntungkan kaum industri asing. Kita harus mengolah bahan mentahnja sendiri sebelum dikirim keluar negeri sebagai barang djadi. Kita harus mengadakan upgrading dan processing dalam negeri dan memberi kesedjahteraan kepada kaum buruh kita sendiri. Beliau mejakinkan pula bahwa pasaran dunia pasti dapat kita rebut asal kita dapat bekerdja terus dengan sistim-sistim yang revolusioner dan menghilangkan sistim birokrasi dan liberal.

Selandjutnja beliau mengandjurkan agar rakjat harus turut mentjegah manipulasi yang terdapat dalam bidang ekonomi dengan mendjalankan social control, social participation dan social responsibility, karena masjarakat keseluruhannja harus bertanggung-djawab atas keselamatan kesedjahteraan bangsa dan negara.

Seterusnja mengenai kenaikan harga yang menjabkan inflasi itu, tjara-tjara yang terpenting untuk menghentikannja ialah pembasmian daripada kaum manipulator, memperhebat produksi dan

turun kebawah (TURBA), integrasi dengan rakjat jaitu bekerdja dengan segala daja mampu jang ada demi kepentingan masjarakat untuk menudju kemasjarakat adil dan makmur.

Berbitjara mengenai Singapura, J.M. Menteri mengemukakan "personal opinion"-nja bahwa dengan setjara konsekwen berpegang pada doktrin BERDIKARI didalam bidang ekonomi, maka beliau tetap akan melandjutkan perdjuaan kita jaitu akan tetap mendjalankan segala kegiatan-kegiatan jang telah ditjapai hingga kini, antara lain tetap mengadakan upgrading didalam negeri dan ekspor langsung ke negara konsumen. Beliau tidak akan kembali kepada keadaan sebelum konfrontasi jaitu membuat Singapura sebagai entrepot.

Selesai konperensi pers, J.M. Menteri beserta Ibu Menteri dan rombongan meninggalkan pabrik Margoredjo menudju ketempat penginapan di Gedung Agung pada djam 16.15.

Pada djam 18.00 sore J.M. Menteri telah siap diruang tamu Gedung Agung menunggu kedatangan rombongan Pawai Drumband di halaman Gedung Agung.

Djam 18.30 drumband tiba dihalaman Gedung Agung dan pada djam 18.45 upatjara penjerahan corned beef, ekspor pertama dilakukan setjara simbolis jang berlangsung dengan penuh hidmat dan berkesan dan diserahkan oleh Direktur Utama P.T. MANTRUST kepada J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri BRIGDJEN A. JUSUF.

Selesai upatjara penjerahan corned beef setjara simbolis, maka J.M. Menteri beserta Ibu dan rombongan meninggalkan Gedung Agung dan dengan djalan kaki menudju Pekan Raja Dwi Dasawarsa R.I. Kundjungan pertama adalah ke Stand KOMPERINDRA jang dilandjutkan dengan penindjauan ke Stand DEPERDAG. Sebagai penutup atjara J.M. Menteri beserta Ibu dan rombongan ketempat Malam Kesenian untuk menjaksikan tarian Indonesia VIATIKARA jang disadjikan oleh Lembaga Kebudayaan Nasional Bandung.

BRIEFING DENGAN PERWAKILAN PERUSAHAAN NIAGA NEGARA (PNN) JOGJA, SEMARANG, BANDUNG

Pada tanggal 20 Agustus djam 09.00 pagi J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri BRIGDJEN ACHMAD JUSUF mengadakan briefing dengan Pemimpin-pemimpin Perwakilan Perusahaan Niaga Negara yang berkedudukan di Jogjakarta, Semarang dan Bandung yang dihadapkan oleh Kepala Perwakilan Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri di Djokja.

Pokok-pokok yang ditandakan oleh Menteri dalam briefing tersebut adalah antara lain: Bilamana dahulu P.N.N. adalah pegawai negeri yang berdagang, maka kini harus ditjamkan bahwa pegawai P.N.N. adalah pedagang yang bekerdja untuk Pemerintah.

Untuk mendjalankan tugas masing-masing maka kita harus mempunyai pedoman atau petunjuk. Djadi the principles harus ada untuk mengambil tindakan-tindakan dikemudian hari. Prinsip yang terutama ialah bahwa didalam tindakan kami, kita harus tahu yang manakah tugas pokok kita, baik tugas komersiil maupun tugas idiil.

Untuk mentjapai stabilisasi dalam perekonomian kita maka kita harus berani berdjuaang dengan segala kekuatan dan daya mampu kita untuk merebut leading position dalam perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri.

Departemen Perdagangan haruslah menjadi tempat berlindung daripada perusahaan swasta dan tunduk pada garis dan kegiatan-kegiatan yang kita tentukan. Kita harus menghilangkan rasa takut, bimbang dan birokrasi. Sebab itu kita harus hilangkan birokrasi, amptenarij dan feodalisme.

Filsafat Ekonomi kita adalah filsafat Ekonomi yang digariskan oleh P.J.M. Presiden Sukarno, jaitu: "Heaven revolutionary spirit combined with down to earth handling of problems is they arise". Semangat harus tetap tinggi, akan tetapi dalam meng "tackle" dalam soal/problematik kita harus down to earth. Kita harus berani bertindak dan harus mempunyai kegiatan. Yang terpenting yang harus ada dahulu ialah semangat dan kemudian hasil pekerdjaan yang konkrit.

Sesuai dengan ukuran revolusi, maka kita harus ber PRO BONO PUBLICO jaitu mengabdikan dan bekerdja demi kepentingan masyarakat dan kesedjahteraan umum. Kita harus berani mengambil tindakan tanpa menunggu undang-undang atau peraturan, asal sadja demi kesedjahteraan umum.

Syarat-syarat yang diperlukan untuk turut ikut demi kepentingan revolusi ialah:

1. kesediaan pada revolusi djadinja bukan pada golongan misalnja:

2. pemimpin-pemimpin harus patriot dan achil. Ini berarti bahwa pegawai dan pemimpin harus berwatak dan pandai.

Kita harus Manipolis, Pro-Nasakom dan anti Imperialisme. Kita harus ber-NASAKOM dalam arti perasaan sebagai warganegara dan bangsa Indonesia dan pengertian ini membawa kita kepada kesatuan.

P.N.N adalah pelopor dalam bidang perekonomian dan kita harus mengabdikan kepada masyarakat disamping mentjari keuntungan untuk Negara.

Adalah hal-hal yang menggembirakan bahwa P.N.N. dalam beberapa bulan belakangan ini telah dapat dilaksanakan 10% dari keseluruhan ekspor dari Indonesia, sedangkan dalam tahun-tahun sebelumnya persentase ini baru ditjapai dalam waktu 8-10 bulan. Dalam 3 bulan P.N.N. telah dapat mengkonsolidasi dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang diperlihatkan dengan murni dan djujur. P.N.N. harus merupakan kesatuan demi kepentingan masyarakat kita.

Masing-masing P.N.N. merupakan satu unit, dengan otonomi tertentu, akan tetapi dalam melaksanakan tugasnja mereka harus merupakan suatu kesatuan dan harus bekerdjasaama demi kepentingan masyarakat.

Sekali lagi J.M. Menteri menegaskan agar para pemimpin P.N.N. dan Perwakilan-perwakilanja harus berani bertindak dan bertanggung djawab atas segala tindakannja tanpa meminta terlebih dahulu pertimbangan Menteri atau atasannja: sebagai "guidance" pakailah motto: pro bono publico jaitu demi kepentingan masyarakat. Para pemimpin harus menghilangkan sifat-sifat birokrasi, alanfikiran amptenar dan berani menghadapi tiap-tiap problem yang timbul dalam bidang masing-masing, serta menjelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Untuk maksud ini maka diperlukan semangat pemimpin.

Sebagai syarat-syarat mutlak dalam pimpinan revolusi ialah:

1. capacity, kemampuan melaksanakan tugas;
2. dedication dan devotion dalam bidang tugas masing-masing;
3. keberanian untuk melaksanakan tugasnja sehingga sebagai pemimpin merupakan suatu "pushing power";
4. harus dapat melihat problematik setjara djelas dan dapat bertindak untuk mengatasinja;
5. memiliki suatu heaven storming revolutionary spirit yang tak henti-hentinja, serta penjesuaian diri pada kenyataan adalah penting dan djangan tergantung sadja pada peraturan dan keputusan-keputusan yang telah basi yang tidak mungkin didjalankan lagi, misalnja peraturan-peraturan pada zaman kolonial.

Caranya menjetop inflasi ialah:

memperbesar National Income sedangkan pengeluaran-pengeluaran harus tetap dengan "bezuiniging" daripada pemakaian;

perpadjakan perlu diintensifkan;

production approach dalam rangka pelaksanaan prinsip BERDIKARI dalam bidang ekonomi umumnja dan chususnya dalam bidang impor, ekspor dan industri.

Untuk menjetop inflasi ini maka State Enterprise ialah yang memegang peranan penting untuk memperbesar National Income ini. Agar supaya maksud ini tertjapai maka haruslah terlebih dahulu adanya ompromi, kegiatan dan kerdjasama dalam segala bidang antara pemimpin dan yang dipimpin jaitu kaum buruh agar kesedjahteraan dalam perusahaan-perusahaan masing-masing, terdjamin. Para pemimpin harus bertindak dan berusaha didalam daya mampu masing-masing.

Selanjutnja J.M. Menteri memerintahkan agar "verkeerde investments" seperti bungalows yang anja dinikmati oleh sekelompok orang atasan saja dan mobil-mobil didjual ("liquid maken") agar

hasil pendjualannja dapat dipakai untuk keperluan lain yang lebih berguna.

Sebagai penutup, J.M. Menteri mengandjurkan agar menghilangkan mental bordjuis karena dengan mental demikian maka kita tidak bisa madju. Demikianlah pula rasialisme harus dihilangkan, dan untuk kepentingan ekonomi, kita akan pakai setiap unsur yang ada dalam masjarakat demi pengabdian kepada masjarakat dan revolusi.

Djam 11.30 J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Perdagangan Luar Negeri BRIG-DJEN A. JUSUF beserta Ibu Menteri dan rombongan menudju lapangan terbang Adisutjipto dimana didjamu makan siang setjara spesifik Indonesia. Selesai makan siang maka sebagai penutup kundjungan beliau ke Jogjakarta J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri mengutarakan tanda terimakasihnja yang sedalam-dalamnja atas sambutan yang meriah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta dan Direksi dan Karyawan P.T. Mantrust pada chususnya.

Djam 13.00 pesawat terbang meninggalkan lapangan terbang Adisutjipto meluntjur diudara menuju Djakarta dan tiba dilapangan terbang Kema-joran pada djam 15.00 petang.

P.T. KAPOK INDONESIA

(PERUSAHAAN NEGARA)

PEMBELI, PENDJUAL DAN EKSPORTIR TUNGGAL UNTUK HASIL
KAPOK INDONESIA

TURUT SERTA MEMBANTU PEMERINTAH DALAM MEMPERBESAR EKSPOR,
HASIL BUMI INDONESIA DEMI SUKSESJA REVOLUSI DALAM BIDANG
PEREKONOMIAN.

Kantor Pusat :

Djl. R. Patah 33, Semarang
Tilp. Sm. 668
Cable : PTKAPOK SEMARANG.

Tjabang Djawa Tengah :

Djl. R. Patah 33, Semarang
Tilp. Sm. 649 — 1780
Cable : KAPOK SEMARANG.

Tjabang Djawa Timur :

Djl. Radjawali 5, Surabaya
Tilp. U. : 3658 — U. 3682
Cable : KAPOK SURABAJA.

Perwakilan Tegal :

Djl. Diponegoro 34, Tegal
Tilp. 242
Cable : PERKAPOK TEGAL.

Perwakilan Makasar :

Djl. Kalimantan 88, Makasar
Cable : PERKAPOK MAKASAR.

Perwakilan Djakarta :

Djl. Teuku Tjihik Ditiro 46
Flat 18, Djakarta
Tilp. Menteng 702
Cable : PERKAPOK DJAKARTA

NIAGA NEGARA

ADALAH MILIK KITA SEMUA

Pada tanggal 30 Agustus 1965 pada pembukaan Rapat Kerdja P.N. Aneka Niaga, J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri BRIGDJEN ACHMAD JUSUF telah berkenan memberikan pidato sambutan/amanatnja.

Diuraikan dan didjelaskan oleh beliau, bahwa segenap karyawan baik dari lapisan atas maupun bawah dari perusahaan Aneka Niaga kesemuanja adalah pemilik daripada perusahaan, sebab perusahaan ini adalah kepunjaan Negara adalah kepunjaan kita masing-masing. Oleh karena itu maka kita mempunyai hak dan kewadajiban terhadap perusahaan ini; kita wadajib memberikan kesedjahteraan setjara langsung kepada seluruh karyawan P.N. Aneka Niaga chususnja dan setjara tidak langsung kepada masjarakat umumnja. Kita harus bertanggung-djawab atas keselamatan daripada perusahaan ini dan harus pula menanggung segala akibat-akibat daripada segala tindakan jang dilakukannya.

Kita semua baik pegawai rendah, sampai ke tingkat pimpinan (direksi) bahkan djuga Menteri-nja, harus mempunyai alam pikiran untuk menjelamatkan Perusahaan Niaga ini terhadap siapapun djuga dan berusaha dan bekerdja untuk perkembangan dan kemandjuaan daripada perusahaan ini karena dengan adanja kemandjuaan maka setiap karyawan menikmatinja.

PDN (Perusahaan Dagang Negara) mendjadi Perusahaan Niaga Negara (PNN)

Selandjutnja dibentangkan oleh beliau mengenai PNN jang dahulunjanya disebut Bhakti-Bhakti, jang berdjumlah 9 Bhakti itu, akan tetapi tidaklah terbukti adanja pembaktian sama sekali. Malahan hanya mempersukar para indentors dan pedagang dengan segala matjam alasan demi kepentingan diri sendiri dan mengabaikan masjarakat pada umumnja.

Kini telah terbukti, bahwa dengan adanja kerdja sama serta kemauan jang keras, maka Perusahaan Niaga Negara telah keluar dari satu impasse. Suatu impasse, dalam pada mana selama waktu 7 bulan tidaklah terdapat kegiatan-kegiatan apapun sebagai akibat daripada keputusan untuk mereorganisir/menspesialisir Bhakti-Bhakti. Barulah dalam 3 bulan belakangan ini maka berkat kerdjasama dan usaha serta keputusan untuk meneruskan usaha Niaga-Niaga maka terdapatlah kemandjuaan dari perusahaan-perusahaan.

Selandjutnja Jang Mulia mengharapkan agar pada bulan Desember 1965 jang akan datang maka Perusahaan-Perusahaan Niaga Negara telah harus mentjerminkan kemandjuaan dan kegiatan-kegiatan jang konkrit dengan kerdjasama jang djudjikan karena P.N.N. hendaknja merupakan faktor stabilisasi daripada keadaan ekonomi kita dan tjawab toh bagi perusahaan Swasta. P.N.N. adalah salah satu unsur jang penting dalam ikut serta menanggulangi atasi kesukaran-kesukaran ekonomi dalam waktu ini. Kita harus dapat mengatasi mismanagemen (pembinaan jang salah) karena dengan pembinaan jang baik dapat diharapkan efisiensi dan aktivitas. Leadership disemua tingkatan (levelling) harus dibangkitkan dan semua pegawai dan pimpinan harus patriot, pandai, berwatak dan setia kepada Revolusi jaitu Revolusi Indonesia dengan Pergerakan Besar Revolusi kita. Dan djika sampai bulan Desember ini P.N.N. tidak bisa survive, maka terpaksa akan dibubarkan.

Tugas kita untuk menjelamatkan dan memperbesar P.N.N.

Kita sebagai warganegara Indonesia harus bekerja sama dan mengabdikan kepada Negara, dan dalam hal ini sebagai pegawai dari Perusahaan Niaga Negara kita hendaknja menjelamatkan P.N.N. (Perusahaan Niaga Negara). Karena modal jang kita pakai adalah modal negara dan dengan sendirinya hidup kita adalah tergantung daripada perkembangan P.N.N. Dengan adanja kemandjuaan, maka kesedjahteraan seluruh karyawan akan terdijalankan dan kini tergantung daripada pembinaan perusahaan.

Antara atasan dan bawahan harus merupakan suatu tubuh jang homogen dalam usaha melaksanakan kegiatan-kegiatan dan sama-sama mendjalin sekelompok kerdja dengan dasar (basis) jang kuat dan dengan kerdjasama jang erat dan dengan keadilan jang sama antara Pemimpin dan jang dipimpin.

Selandjutnja Menteri menegaskan bahwa personal contact atau personal relation harus ada antara pemimpin dan jang dipimpin karena hal itu adalah dasar untuk memperoleh kemandjuaan. Para atasan harus mengetahui kesukaran-kesukaran daripada bawahan dan sebaliknya pihak bawahan harus pula mengetahui (understanding) problem jang dihadapi oleh sipemimpin. Djadi alangkah baiknja bila antara atasan dan bawahan ha-

la "open-talk". Sifat birokrasi, ambtenarij jang hanja patuh pada peraturan-peraturan harus di- ang. Kita harus berani bertindak dengan menje- aikn pada keadaan (adjust to reality). Kita rus berani mengambil keputusan sendiri tanpa paku pada peraturan dan sesuai dengan kea- an dengan tidak menunggu dulu pertimbangan n putusan dari atasan akan tetapi bertindak ang tanggung-djawab sendiri demi kepentingan asjarakat.

Segala tindakan-tindakan dan usaha-usaha dari- da pimpinan (management) adalah ditudjukan uk keuntungan perusahaan dan kesedjahteraan anisasi seluruhnja daripada P.N.N., setjara gung dan kesedjahteraan masjarakat dengan ak langsung.

Sebagai telah kita ketahui apresiasi masjarakat hadap P.N.N. adalah buruk dan memandang N.N. sebagai koruptors karena P.N.N. tidak tterminkan kesedjahteraan dan kepentingan asjarakat. Unsur-unsur jang baik jang ada pada N.N. mendjadi hilang dan mendjadi korban dari- a pembinaan jang salah (mismanagement) serta ang asuhan. Selama tudjuh bulan P.N.N. men- at tjatjian daripada masjarakat, tapi sjukurlah ma tiga bulan belakangan apresiasi masjarakat ri demi sehari mulai agak kembali dan recht- erheid telah ada.

Perertian dan kerdjasama antara Dewan Perusa- n dan Management (Direksi).

antara Dewan Perusahaan dan Direksi harus apat kerdjasama jang sebesar-besarnja untuk abdi kepada organisasi untuk kepentingan dan adjuan daripada perusahaan. Kita harus berani etjahkan setiap persoalan jang timbul dan tjari djalan keluar (down to erath handling e problem).

butuhan-kebutuhan masjarakat semakin ber- ah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum- (exploding demands) dan satu-satunja djalan k memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut ia- dengan berproduksi, memberikan proteksi ke- industri, memberikan fasilita dalam pembe- kredit dan dengan bekerdja (TURBA).

investasi jang salah tidak diperkenankan iau menandaskan, bahwa tidak perlulah P.N.N. (sahaan Niaga Negara) mempunjai bungalow-

bungalow jang hanja dipergunakan dan dinikmati oleh beberapa kelompok orang atasan sehingga terdapatlah suatu ketidakadilan. Kita tidak boleh hanja mengingat kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan umumlah jang harus diperdjuangkan dan dengan djalan ini barulah kita dapat mentjip- takan adanja loyalita.

Demikian pula tidak perlu adanja suatu penjam- butan besar-besaran djikalau seorang Direktur Utama mengadakan kundjungan ke daerah-daerah. Tjukuplah penjambutan dilakukan oleh Kepala Perwakilan P.N.N. dengan sederhana, karena jang terutama ialah kita memperlihatkan gambaran jang konkrit daripada semua kegiatan-kegiatan jang telah dikerdjakan dengan segala untung rugi daripada organisasi.

Dalam bidang impor dan ekspor P.N.N. harus leading

Selandjutnja ditandaskan bahwa P.N.N. harus leading dalam impor dan ekspor. Perusahaan Niaga Negara nanti mendjadi tempat berlindung perusa- haan-perusahaan Swasta. Djikalau "leading posi- tion" daripada P.N.N. telah tertjapai, maka dengan sendirinja stabilisasi harga akan tertjapai pula. Bila P.N.N. disamping leading positionnja dalam bidang impor djuga dapat menggondol comman- ding dan leading position dalam bidang ekspor maka akan tertjapailah suatu Kontinuitas dari flow of goods.

Menteri mengharapakan agar P.N.N. turut setjara aktif dalam perdagangan international dan kita harus mendesak kemauan kita dalam perdagangan Internasional dan menentukan harga penjerahan dalam negeri, mengingat kebutuhan daripada luar negeri akan hasil kekajaan alam kita dimana kese- djahteraan dan produksi mereka tergantung.

Bargaining position kita djauh lebih kuat dari- pada mereka. Djadi kita haruslah mengetahui teh- nik serta tjara pendjualan dari bahan-bahan eks- por kita agar harga pembelian diluar negeri dapat dinaikkan.

Sebagai penutup beliau mengandjurkan agar se- mua karyawan, pemimpin dan jang dipimpin beker- dja untuk kelangsungan, kedadjuan serta kese- djahteraan organisasi khususnja dan kesedjajte- raan umumnja, demi tertjapainja masjarakat adil dan makmur.

Adjaran² Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno

Sampai Ketemu Lagi!

Het is niet:

Het daagt, omdat de haan kraait.

Maar ten rechte is het:

De haan kraait, omdat het daagt.

..... Muting, Digul, Banda! Dan kawan kita Tjipto Mangunkusumo berangkat, membawa keluarganya, diiring oleh isterinya yang berani dan berbesar hati, — meninggalkan kita, yang buat beberapa tahun lamanya berdiri didamping-sisinya, dengan persamaan azas, persamaan tujuan, dan persamaan tindak. Buat ketiga kalinya maka Tjipto masuk kedalam hidup-pembuangan, menjalankan hukuman yang dijatuhkan padanya oleh hak-luar biasa daripada kaum yang memerintah; buat ketiga kalinya, ia mempersembahkan pengorbanannya terhadap pada Tanah-air dan Bangsa yang ia abdikan, dengan kepala yang tegak dan hati yang besar.

Dan kita, kawan-kawannya yang ia tinggalkan, kita kaum nasionalis Indonesia, kaum nasionalis Sumatera, kaum nasionalis Sunda, kaum nasionalis Djawa, kaum nasionalis lain², — kita mengutjap selamat djalan padanya, dengan kepala yang tegak dan hati yang besar djuga. Sebab fadjar sudah mulai menjingsing; ajam djantan karenanya sudah mulai berkokok. Tjipto dibuang, atau Tjipto tidak dibuang, pergerakan madju, kearah yang ditudjunja, matahari tak urung akan terbit.

Sebagai yang kita tuliskan dalam „Suluh Indonesia Muda” yang kesatu; kita pertjaja akan keharusannya segala hal² yang terdjadi; kita pertjaja bahwa semua hal yang terdjadi itu ada baik dan berfaedah bagi kesudahannya. Karena itulah kita berbesar hati!

Kita, kawan-kawannya, kita akan senantiasa memperingati kata-pesannya, yang ia maktubkan dalam ia punja surat terbuka dimuka ini. Kita akan tjamkan ia punja pesanan, bahwa kita tak boleh „melupakan ichtiar, walau bagaimanapun djuga

ketjilnja, untuk membikin indahnja hari-kemudian mendjadi seindah-indahnja”. Kita akan menundjukan pada anak-tjutju dan turunan kita, bahwa hidup kita ialah „bukan hidup jang sia²”, bahwa hidup kita ialah hidup berdjombang.

Apakah pengadjaran yang harus kita ambil dari pembuangan kawan Tjipto ini? Apakah tjermata yang diperlihatkannya?

Pertama-tama: Tjaranja kawan Tjipto mendjelaskan pembuangan ini adalah mengadjarkan pada kita, bahwa ichtiar membikin indahnja hari-kemudian itu ialah bukannya ichtiar yang gampang dan ringan, akan tetapi ichtiar yang susah-pajah dan berat; — suatu ichtiar yang tak sudi akan perorangan diri yang setengah-setengah, suatu ichtiar yang menuntut penjerahannya segenap kepunja njawa. „Men moet zich geheel geven; geheel De hemel verwerpt het gesjacher met meer mender”. Tjipto Mangunkusumo telah menundjukan djalan dalam tjaranja mengabdikan pada rakyat dan Bangsa itu. Ia menuntun; ia memberi tjolongan to h..... Walaupun ia menderita kesengsaraan rezeki; walaupun ia merasakan kemelaratan yang terdjadi oleh matinja ia punja perusahaan tabung, walaupun lijdensbeker ada sepenuh-punjanya, maka dengan roman muka yang bersenyum memikul segenap beban yang ditimbunkan dipundaknya oleh pengabdianja kepada rakyat dan Bangsa. „Laten wij er niet om huilen, en niet droge ogen ook dit aanvaarden; verdiend of verdiend..... De geschiedenis van ons land volgt haar weg. Eist zij, om zich naar eis kunnen afwikkelen, offers, welnu, wij geven hreugdevol die offers ook. En waarom ik dat of niet zou mogen wezen, zou ik niet begrijpen. Mé Ik zou jaloers zijn op degene, die offeren maken wanneer ik veroordeeld werd tot enkel toezien begitulah ia menulis pada Ir Sukarno.

Inilah tjontoh dan pengadjaran, yang kawan Tjipto Mangunkusumo berikan pada kita; per

ajaran pengorbanan dan pengadjaran ke-
wadjiban, der leer van het offer, de leer van
den plicht pengadjaran jang menjerapi segenap
Baghavat Ghita, menjerapi segenap nasehat-nase-
hatnja Cri Krishna dengan arti, bahwa tiada suatu
hal jang besar bisa tertjapai, bila tidak dibeli de-
gan pengorbanan jang mahal, — dan me-
jerapi nasehat-nasehat Cri Krishna itu dengan
arti pula, bahwa tiap² manusia harus melakukan
ewadjabannja dengan tidak menghitung-hitung
apa jang nanti akan mendjadi buahnja, tidak mem-
bilang-bilang apa nanti jang akan berikut.

Didalam pengabdian terhadap kepada Ibu-Indo-
nesia; didalam menjalankan kewadjaban²nja pa-
triot, maka putera² Indonesia itu harus memper-
sembahkan dengan iman jang besar dan hati jang
dla segala pengorbanan², walaupun bagaimana
uga pahitnja, dan walaupun bagaimana djuga
stimnja. Selama putera² Indonesia belum tjukup
empunjai kekuatan bersenjum manakala
u-Indonesia minta kebesaran-iman dan keridlaan
ti atas pengorbanan jang sepahit-pahitnja dan
getir-getirnja, selama itu maka merekapun belum
tjukup kekuatan menerima hadiah jang diingini-
a. Selama mereka belum kuat memikul susah,
lama itu mereka belum kuat memikul senang!
Didalam arti inilah maka pengorbanan kawan
tjpto itu harus kita artikan. Apakah pengorbanan
tidak akan sia²? Apakah ia akan berfaedah?
ada pengorbanan jang sia²; tiada pengorbanan
ng tak berfaedah; tiada pengorbanan jang ter-
ang. „No sacrifice is wasted”, begitulah Sir
ver Lodge berkata.

Dari pengorbanan² hari sekarang itulah maka
ri kemudian akan terdjadi; dari pengorbanan²
ri sekarang itulah maka hari Indonesia Baru
an terlahir, lebih besar dan lebih mulia dari-
la Indonesia sekarang, ja, lebih mulia daripada
lonesia dahulu. „No sacrifice is wasted!” Kar-
nja putera² Indonesia, bekerdjalah, beker-
a, dan djanganlah putus asa!

Bekerdjalah, agar supaja pergerakan kita, usaha
a mentjari keselamatan, bisa mendjadi k u a t.
ab pembuangan kawan Tjpto Mangunkusumo,
tuhnja korban jang tiada berhentinja, adalah
tu bukti jang senjata-njatanja, bahwa pergera-
kita itu, walaupun madju, masih l e m b e k,
suatu bukti jang senjata-njatanja, bahwa habis-
kini temponja hidup berenak-enak dan habis-
pula temponja bekerdja setengah-setengahan.
erdja sepenuh-penuhnja, membanting tulang,
neras tenaga, untuk menjusun kekuatan² per-
kan kita dibikin mendjadi sekuat-kuatnja,

merapatkan golongan² itu satu per satunya pula,
itulah jang kini harus mendjadi sembojan dan ikti-
kad semua patriot Indonesia!

Tidaklah menjedihkan hati kiranja, bila satu
fihak membela sampai habis²an, sampai dimasuk-
kan pendjara atau diasingkan, sampai dimasukkan
neraka djahanam, sedang fihak jang dibelanja tak
tahu akan menghargai pembelaan itu, tak tahu
akan menjambut pengorbanan itu, dan tinggal
enak-enak sahadjaja atau hanja bekerdja setengah-
setengahan? Tidaklah memutuskan asa kiranja,
bila satu fihak menarik-narik dan menghela-hela
sampai habis²an tenaga dan habis²an njawa, se-
dang fihak jang lain hanja mau ditarik dan dihela
sahadjaja dan tidak mau ikut menarik dan ikut meng-
hela djuga?

Tetapi sjukurlah jang keadaan tidak begitu.
Sebagai tanda-hidup dan tanda-sadar, sebagai
tanda bahwa fadjar memang sudah menjingsing,
maka dimana-mana terdengarlah sembojan „beker-
dja” tahadi. Dimana-mana asjiklah barisan² kita
memperkuat dirinja masing², menggabung-gabung-
kan dirinja satu sama lainja. Dimana-mana dimu-
lainjalah usaha self-reconstructie dan usaha per-
satuan. „Suluh Indonesia” dan „Indonesia-Merdeka”
digabungkan mendjadi „Suluh Indonesia Muda”,
dan kekuatan² partai² kita digabung-gabungkan
dan dikumpul-kumpulkan dalam P.P.P.K.I.

Dengan sesungguhnya! Tiadalah alasan buat ber-
ketjil hati..... Tiadalah lajaknja buat berputus-
asa, — bahkan makin kentjanggalah rasanja darah
kita berdjalan dan makin hangatlah pukulan hati
kita, kalau kita menengok fadjar ini. Madju,
madju..... terus madju sahadjaja dengan tidak
mundur selangkah, tidak berkisar sedjari.....
madju, terus madju kearah keselamatan, begitulah
djalanja pergerakan kita.

Karenanja, maka tiada seteteslah air-mata kita
jang djatuh pada saat kawan Tjpto Mangunku-
sumo minta diri; tiada seteteslah air-mata jang
menjuramkan penglihatan kita pada saat saudara
ini berpisah.

Dengan kepertjajaan jang sepenuh-penuhnja
akan djajanja hari-kemudian; dengan yakin, bahwa
satu kali saatnja pasti datang, jang matahari itu
t e r b i t, maka kita kawan²nja sefaham, menjam-
but salamnja Tjpto Mangunkusumo itu dengan
kata²: bukan „selamat berpisah”, tetapi „sampai
ketemu lagi”!

„Suluh Indonesia Muda”, 1928.

KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI URUSAN BANK SENTRAL DAN MENTERI PERDAGANGAN/KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI No. KEP. 68/UBS/65 TANGGAL 7 AGUSTUS 1965.

Sebagai follow-up dari Surat Keputusan Bersama Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. Kep. 68/UBS/65 tgl. 7 Agustus 1965 (lihat W.P. No. 8), maka oleh Pimpinan BLLD dikeluarkan Ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.

a. Dengan Pengumuman No. 18/Imp/BLLD/65 tertanggal 30 Agustus 1965 telah ditetapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pasal 3 dari Surat Keputusan Bersama tersebut diatas berarti bahwa ketentuan-ketentuan dalam S.K.B. No. : Kep. 57/UBS/65 tanggal 12 Djuli 1965 baru berlaku terhadap S.P.P.-S.P.P. yang berasal dari ekspor yang formulir E3-nja diberi „Fiat Muat” oleh Bea dan Tjukai pada tanggal 12 Djuli 1965 dan sesudahnja.
2. Dengan demikian maka S.P.P.2 dari ekspor² sebelumnya masih diperkenankan digunakan untuk impor oleh yang namanya tertjantung pada SPP tersebut menurut prosedur yang ditentukan dalam Surat Keputusan Bersama No. Kep. 35/UBS/65 tanggal 10 Mei 1965 jo Pengumuman BLLD No. 9/Imp/BLLD/65 tanggal 13 Mei 1965, terketjuali apabila telah terlandjur mengikuti ketentuan-ketentuan pelaksanaan sebagaimana tertjantung dalam Pengumuman BLLD No. 3/Eks/BLLD/65 tanggal 16 Djuli 1965.
3. Berhubung dengan terlambatnja pengeluaran Surat Keputusan Bersama tersebut diatas maka S.P.P.2 yang berasal dari ekspor berdasarkan formulir E3 yang „Fiat Muat”nja ditanda tangani oleh fihak Bea

dan Tjukai sebelum tanggal 12 Djuli 1965 dan SPPnja dikeluarkan dalam masa tanggal 12 Djuli 1965 s/d 31 Djuli 1965 masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus dan dengan sendirinja mengikuti ketentuan termaksud pada pasal 2 diatas.

4. Untuk pembayaran 20% dari claim ekspor sebagaimana termaksud dalam Pengumuman Pimpinan L.A.A.P.L.N. No. 60 tanggal 16 Agustus 1964 para eksportir dapat
 - a. menggunakan SPPnja sendiri
 - b. membeli SPP pada Bursa.

b. Dengan Pengumuman No. 4/Eks/BLLD/1965 tertanggal 30 Agustus 1965, ditetapkan lebih lanjut ketentuan² pelaksanaan sebagai berikut:

1. Disamping Produsen Importir seperti termaksud pada pasal 1 Pengumuman Biro Lalu Lintas Devisa No. 16/Imp/BLLD/65 tanggal 16 Djuli 1965 diperkenankan pula kepada Perusahaan² Niaga Negara (P.N.N.) yang ditundjuk oleh Menteri Perdagangan/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri untuk turut serta membeli S.P.P. pada Bursa khusus untuk keperluan impor para produsen yang tidak/belum mempunyai angka pengenalan sebagai „produsen-importir” (zelf importerende bedrijven).
2. Pasal 2 Pengumuman Biro Lalu Lintas Devisa No. 16/Imp/BLLD/65 tanggal 16 Djuli 1965 mulai berlaku terhadap S.P.P. yang berasal dari ekspor berdasarkan formulir E3 yang „Fiat Muat”nja ditanda tangani oleh Bea dan Tjukai pada tanggal 12 Djuli 1965 dan sesudahnja.

 Dengan terlangganan madjalah "WARTA PERDAGANGAN", Anda dapat mengikuti Kebidjaksanaan Pemerintah dibidang Perdagangan Khususnja dan Ekonomi pada umumnja.

DELEGASI WEWENANG MENTERI URUSAN BANK SENTRAL KEPADA BIRO LALU LINTAS DEvisa UNTUK MENILAI DAN MEMUTUSKAN DENDA PEMBATALAN K.V.E.

S.K. Menteri Urusan Bank Sentral No. Kep. 70/UBS/65 tgl. 12-8-1965.

Dengan menundjuk pada Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No. Kep. 70/UBS/65 tgl. 12 Agustus 1965 mengenai delegasi wewenang U.B.S. kepada Pimpinan BLLD dalam menilai dan memutuskan permohonan pembebasan denda atas K.V.E. jang seluruhnja/sebagian dibatalkan, dengan pengumuman No. 5/Eks/BLLD/65 tgl. 2 September 1965, memberitahukan prosedurnja sbb.:

Eksportir jang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan pembebasan denda kepada B.L.L.D. Pusat, melalui B.L.L.D. setempat, ketjuali terhadap K.V.E. jang ditutup didaerah Djakarta Raya.

Surat Permohonan tersebut harus disertai bukti² setjara tertulis jang pada pokoknja menjatakan bahwa tidak terlaksananja ekspor jang bersangkutan tidak dapat dielakkan, berhubungan dengan alasan² (kejadian² dan keadaan²) jang berada diluar kekuasaannja. Bukti² tersebut harus dibuat/disahkan oleh instansi jang berwenang; B.L.L.D. Tjabang setempat akan memberikan pendapat/advis berdasarkan bukti² jang diterimanja;

Oleh B.L.L.D. Tjabang permohonan tersebut beserta lampiran²nja dikirimkan kepada BLLD Pusat (Divisi Pengawasan) untuk diputuskan apakah pembatalan K.V.E. jang bersangkutan dapat dibebaskan atau tidak.

Apabila B.L.L.D. Pusat menjetudjui pembebasan denda, maka kepada Bank Devisa bersangkutan diinstruksikan setjara tertulis untuk membajar kembali denda jang telah dipungut oleh Bank Devisa, sesuai pasal 1. 2. 12. H.P.P.D.

Ketentuan diatas berlaku terhadap K.V.E.² jang tutup sedjak tanggal 15 Pebruari 1965.

Prosedur permohonan pembebasan denda atas pembatalan K.V. Ekspor (sebagian atau seluruhnja).

MENTERI URUSAN BANK SENTRAL/GUBERNUR BANK INDONESIA

Menimbang:

Bahwa guna kelantjaran pelaksanaan dan penyelesaian sesuatu sesuai dengan pasal 20 dari Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No. Kep. 2/UBS/65 tanggal 8 Djanuari 1965, dianggap perlu untuk mendelegasikan wewenang kami sebagai Pimpinan Biro kepada Biro Lalu Lintas Devisa.

Mengingat:

Undang-Undang Devisa tahun 1964.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

1. Mendelegasikan wewenang Menteri Urusan Bank Sentral untuk menilai dan memutuskan permohonan² pembebasan dari denda atas pembatasan K.V.E. (sepenuhnja atau sebagian), sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No. Kep. 2/UBS/65 tanggal 8 Djanuari 1965, kepada Biro Lalu Lintas Devisa.
2. Prosedur permohonan pembebasan denda akan diatur oleh Biro.
3. Keputusan ini mulai berlaku untuk K.V.E.² jang ditutup sedjak tanggal 15 Pebruari 1965.

MENTERI URUSAN BANK SENTRAL/
GUBERNUR BANK INDONESIA

ttd.

(JUSUF MUDA DALAM).

Berdikari dalam ekonomi! Apa jang lebih kokoh daripada ini, Saudara²? Seperti kuktakan didepan M.P.R.S. tempo hari, kita harus bersandar pada dana dan tenaga jang memang sudah ditangan kita dan menggunakannya semaksimal²nja. Pepatah lama "ajam mati dalam lumbung" harus kita achiri, sekali dan buat selama-lamanja. Kita memiliki segala sjarat jang diperlukan untuk memetjahkan masalah sandang pangan kita.

Presiden Sukarno dalam Tahun Berdikari.

PEMBEBANAN BARANG PENUMPANG DAN KIRIMAN JANG DIMASUKKAN TIDAK ATAS BEBAN DANA DEvisa

Surat Keputusan Bersama Menteri Iuran Negara, Menteri Urusan Bank Sentral, Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri No. 75/UBS/1965 tertanggal 1 September 1965.

MENTERI IURAN NEGARA, MENTERI URUSAN BANK SENTRAL DAN MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI/KUASA MENTERI URUSAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI,

Menimbang :

bahwa dalam rangka penjerderhanaan prosedur dan pembebanan pemasukan barang penumpang dan kiriman tidak atas beban Dana Devisa dianggap perlu mengadakan beberapa penyesuaian dengan kenyataan jang kini dihadapi.

Memperhatikan :

pasal 1 dan 2 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1964 tentang nilai transaksi Rupiah dan pembebanan atas Impor (Lembaran Negara tahun 1964 No. 29).

Mengingat :

- a. Ketentuan 7 dari peraturan Umum Tarif bea-masuk jang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No. 29);
- b. pasal 31 Undang-Undang Devisa 1964 jo. pasal 33 Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No. Kep. 2/UBS/1965 tanggal 8 Djanuari 1965.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mentjabut Surat Keputusan Bersama Menteri Urusan Pendapatan Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Urusan Bank Sentral No. IE/iu/KB/32/12

No. Kep/21/UBS/1964

Kep. 34/UBS/64 tanggal 2 Djuni 1964 dan SKB No. Kep. 35/UBS/1964 tanggal 2 Djuni 1964.

KEDUA : PERATURAN TENTANG TATA-TJARA PENJELESAIAN DAN PEMBEBANAN ATAS PANGIMPORAN BARANG PENUMPANG DAN BARANG KIRIMAN

P a s a l 1.

1) Jang dimaksudkan dalam peraturan ini dengan:

- a. barang penumpang dan barang kiriman, jaitu semua barang jang tiba di Indonesia untuk diimpor dengan tidak menggunakan valuta asing atas beban Dana Devisa ataupun valuta asing lain jang pembebanan penggunaannya sudah diatur didalam sesuatu peraturan Negara.
- b. barang penumpang jaitu barang jang dalam satu kali perdjalanan dibawa serta oleh penumpang kapal laut/udara dan jang diberitahukannya sudah/akan tiba untuknya didalam djangka waktu tiga bulan sebelum/sesudah kedatangan penumpang itu sendiri.
- c. barang kiriman jaitu barang² lain jang dari pada jang termaksud sub b, sekedar tertjakup dalam ketentuan sub a pasal ini.

2) Ketentuan ayat 1 pasal ini tidak mengurangi terhadap ketentuan dalam pasal 3.

P a s a l 2.

- 1) Barang penumpang atau barang kiriman dinjatakan sebagai barang dagangan, bilamana barang itu menilik djenis dan/atau djumlahnja tidak njata untuk dipakai sendiri oleh penumpang/siteralamat jang berkepentingan dan/atau oleh anggauta keluarganya/rumah tangganya.
- 2) Dalam hal ada ke-ragu²an atau perselisihan pendapat tentang pernyataan barang penumpang atau barang kiriman sebagai barang dagangan, keputusan tentang itu ditetapkan oleh Menteri Iuran Negara atau oleh pedjabat jang ditundjukkja.

P a s a l 3.

- 1) Barang jang dibawa serta oleh Perwira dan/atau awak kapal dari kapal laut/udara, dengan mana barang² itu tiba, jang harga keseluruhannja dalam satu kali tiba tidak melebihi US. \$. 25,— (dua puluh lima) fob., diperlakukan sebagai barang penumpang.
- 2) Djika harga keseluruhan barang jang dimaksud pada ajat 1 pasal ini melebihi harga batas tersebut, maka keseluruhan barang² itu diperlakukan sebagai barang kiriman.

P a s a l 4.

- 1) Barang penumpang jang njata bukan barang dagangan jang dimasukkan dalam satu kali perdjalanan :
 - a. djika harga keseluruhannja tidak melebihi fob US. \$. 100,— tiap penumpang dengan maksimum fob US. \$. 300,— untuk satu keluarga, dibebaskan dari bea² masuk, tetapi dikenakan Retribusi Impor Rp. 100,— per US. \$.
 - b. djika harga keseluruhannja lebih dari djumlah² dalam sub a tetapi tidak melebihi fob US. \$. 500,— tiap penumpang dengan maksimum fob. US. \$. 1.500,— untuk satu keluarga, maka untuk keseluruhan harga barang dikenakan disamping bea² masuk penuh, pungutan Retribusi Impor sebesar 25% (dua puluh lima) persen dari bea masuk.
 - c. diika harga keseluruhannja lebih dari djumlah² dalam sub b maka untuk keseluruhan harga barang dikenakan disamping bea² masuk penuh pungutan Retribusi impor sebesar 50% (limapuluh) persen dari bea masuk.
- 2) Dalam memperlakukan ketentuan² diatas, harga dari satu unit barang tidak dapat di-petjah² atas nama lebih dari satu penumpang dan sekedar mengenai mobil hanja diidzinkan satu buah dalam satu tahun untuk satu keluarga.
- 3) Kendaraan bermotor jang diimpor berdasarkan pasal ini tidak boleh dipindahkan tangankan ke-tjual dengan izin Direktorat Bea dan Tjukai jang dapat menetapkan sarat² antara lain pengenaan retribusi impor sebagai barang dagangan.

P a s a l 5.

- 1) Barang penumpang lain dari jang termaksud dalam pasal 4, dikenakan untuk keseluruhan harga-nja disamping bea² masuk, pungutan Retribusi Impor sebesar 150% (seratus lima puluh) persen dari bea masuk, dengan ketentuan kendaraan bermotor dan barang² termaksud dalam Lampiran V daii Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 105/M/SK/64 tanggal 22 April 1964, sebagai telah di-ubah/ditambah, tidak diperkenankan pemasukkannja.
- 2) Selain dari retribusi impor termaksud pada ajat 1, untuk barang tersebut dikenakan pula retribusi BLLD sebesar 5% dari harga C & F dihitung kedalam rupiah menurut Nilai Transaksi Rupiah.

P a s a l 6.

Djika didalam barang penumpang dalam satu kali perdjalanan terdapat baik jang njata bukan ba-rang dagangan, maupun jang dinjatakan sebagai barang dagangan berdasarkan pasal 2 peraturan ini, maka untuk pelaksanaan ketentuan dalam pasal 4 dan 5 peraturan ini, masing² golongan barang itu di-kenakan pembebanan setjara ter-pisah², dengan ketentuan bukan untuk melaksanakan pembebanan menurut pasal ini jang disebutkan dalam pasal 4 berlaku untuk harga total dari ke-dua² golongan ba-rang itu.

P a s a l 7.

Atas pengimporan barang :

1. a. jang berhubungan dengan pelaksanaan projek² di Indonesia oleh Pemborong Luar Negeri, sekedar tidak dapat diimpor berdasarkan ketentuan pasal 23 Rechtenordonnantie (S. 1931 No. 471);
 - b. jang merupakan penggantian seperti replacement dan/atau reparasi;
 - c. untuk badan amal, keagamaan, kebudajaan dan kemasjarakatan, sekedar tidak dapat diimpor ber-dasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 133 tahun 1953;
 - d. kiriman dari perusahaan/badan diluar negeri kepada pusat/tjabangnja di Indonesia;
- a s/d d : jang njata tidak untuk diperdagang-kan dan jang ternjata pembiajaannja dalam valuta

asing mendjadi tanggungan penuh dari sipengirim diluar negeri, tanpa menimbulkan hutang bagi sipenerima dan tidak mengakibatkan beban atas Devisa Negara dan harga keseluruhan nja dalam satu kali tiba tidak melebihi fob US. \$. 200,— (dua ratus) dikenakan bea masuk tanpa sesuatu retribusi.

2. Djika harga keseluruhanja melebihi fob US. \$. 200,— (dua ratus) tetapi tidak lebih dari fob US. \$. 500,— (lima ratus), maka untuk keseluruhan harga dikenakan disamping bea² masuk, pungutan Retribusi Impor 25 (dua puluh lima) persen dari bea masuk.
3. Djika harga keseluruhannya melebihi fob US. \$. 500,— (lima ratus), maka untuk keseluruhan harga barang dikenakan bea² masuk pungutan Retribusi Impor sebesar 50 (limapuluh) persen dari bea masuk.

P a s a l 8.

Barang kiriman jaitu jang tidak termasuk dalam pengertian pasal 7 jang tiba pada satu hari dengan satu angkutan pos, kapal laut/udara untuk satu penerima :

- a. djika harga keseluruhannya tidak lebih dari fob US. \$. 10,— (sepuluh) dibebaskan dari bea² masuk dan retribusi impor.
- b. djika harga keseluruhannya melebihi djumlahdalam sub a, tetapi tidak lebih dari fob US. \$. 100,— (seratus) dan njata bukan barang dagangan dikenakan disamping bea² masuk pungutan Retribusi Impor sebesar 25 (duapuluh lima) persen dari bea² masuk, sedangkan djika merupakan barang dagangan Retribusi Impornja sebesar 150 (seratus lima puluh) persen dari bea masuk dan Retribusi BLLD sebesar 5% (lima persen) dari harga menurut nilai Transaksi Rupiah.
- c. djika harga keseluruhannya lebih dari fob US. \$. 100,— (seratus), maka disamping bea² masuk dikenakan Retribusi Impor sebesar :
 1. bukan barang dagangan, 50 (lima puluh) persen dari bea masuk,
 2. barang dagangan 150 (seratus lima puluh) persen dari bea masuk dan Retribusi BLLD sebesar 5% (lima persen) dari harga menurut nilai Transaksi Rupiah.Larangan² termaksud dalam pasal 5 berlaku djuga dalam hal termaksud sub b dan c diatas djika merupakan barang dagangan.

P a s a l 9.

Pengimporan barang² seperti jang dimaksudkan pada ketentuan 5 Peraturan Umum Tarif Bea Masuk sub f, g, h, dan i tidak dikenakan pungutan Retribusi Impor, seperti termaksud dalam Peraturan ini, djika untuk barang² jang bersangkutan telah diperoleh izin pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk dan selama sjarat² untuk pembebasan bea-masuk itu dipenuhi.

P a s a l 10.

1. Retribusi jang dimaksudkan dalam Peraturan ini dikenakan atas dasar harga C & F dari barang² jang bersangkutan.
Dalam hal barang tiba dengan pos atau kapal udara, maka biaja pos atau kapal udara jang telah dibayar sebenarnya dihitung sebagai biaja pengapalan/pengiriman.
2. Barang² jang berdasarkan suatu Peraturan Negara untuk sementara dibebaskan dari bea² masuk dibebaskan djuga dari pungutan Retribusi Impor dengan ketentuan djika bea-masuk kemudian diwadajibkan dibayar, maka Retribusi Impor wadajib pula dilunasi.
3. Dalam hal kewadajiban membayar bea² masuk dan pungutan² lain terdjadi sebelum berachirnja sjarat djangka waktu jang telah ditentukan, dikenakan pungutan seperti tersebut pada pasal 5 diatas.
4. Apabila kewadajiban membayar itu terdjadi setelah berachirnja sjarat djangka waktu termaksud, berlaku pungutan tersebut pada pasal 4 peraturan ini.

P a s a l 11.

Retribusi Impor jang disebutkan dalam Peraturan ini dipungut oleh Direktorat Bea dan Tjuka serta dipertanggung-djawabkan sebagai penerimaan serba-serbi.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1965, dan agar supaja setiap orang mengetahuinja, mengumumkan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 1 September 1965.

MENTERI URUSAN
BANK SENTRAL,

ttd.

JUSUF MUDA DALAM.

MENTERI PERDAGANGAN
DALAM NEGERI/KUASA MENTERI
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

ttd.

A. J U S U F.

(Brig. Djen. T. N. I.)

MENTERI IURAN NEGARA

ttd.

Drs. HOEGENG.

(Brig. Djen. Polisi)

Pemungutan Retribusi Impor atas impor barang yang dibiayai dengan Devisa Pelengkap

Surat Keputusan Bersama Menteri Iuran Negara, Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. Kep. 76/UBS/65, tertanggal 1 September 1965.

MENTERI IURAN NEGARA, MENTERI URUSAN BANK SENTRAL DAN MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI/KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI;

imbang :

- a. bahwa untuk kepentingan pemupukan dana² guna keperluan pembiayaan pemerintahan Negara perlu diadakan pemungutan iuran² tambahan dibidang-bidang yang menurut perhitungan masih dapat dikenakan pembebanan².
- a. bahwa keadaan tingkat harga didalam negeri bagi barang² impor yang bebas dari sesuatu pengawasan dan/atau pengendalian harga adalah sedemikian sehingga dianggap layak dan patut bahwa sebagian dari keuntungan yang diperoleh dari pendjualan barang² itu diserahkan kepada negara sebagai iuran.

Perhatikan :

- a. Undang² Devisa 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No. 131) dan peraturan² pelaksanaannya dengan mana telah dibuka kesempatan untuk mengimpor barang yang dibiayai dengan devisa pelengkap yang sudah terdaftar pada Bank² Devisa.
- b. Surat Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri tanggal 29 Djuni 1965 No. 103/6/MPLN/SR/65;
- c. Surat Keputusan Bersama Menteri Iuran Negara, Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri tanggal 1 September 1965 No. Kep. 75/UBS/65 tentang Pembebanan barang penumpang dan kiriman yang dimasukkan tidak atas beban Dana Devisa.

ingat :

Ketentuan 7 dari Peraturan Umum Tarif Bea Masuk yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang² No. 5 tahun 1964 (L.N. tahun 1964 No. 29).

MEMUTUSKAN :

etapkan :

- PERTAMA :** Atas impor barang yang dibiayai dengan *Devisa Pelengkap* yang tertajat pada bank² devisa menurut ketentuan yang berlaku tentang itu dikenakan pemungutan Retribusi Impor untuk setiap US. \$ dari harga C. & F, sebesar 50% (Limapuluh) persen dari bea masuk.
- KEDUA :** Pemungutan Retribusi Impor termaksud pada PERTAMA dilaksanakan oleh Direktorat Bea dan Tjukai pada waktu pemasukan barang jbs.
- KETIGA :** Surat Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Djakarta, 1 September 1965.

MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI/KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

MENTERI URUSAN BANK SENTRAL,

MENTERI IURAN NEGARA,

ttd.

ttd.

ttd.

(A. JUSUF).

Drs. HOEGENG

Brig. Djen. T.N.I.

JUSUF MUDA DALAM

Brig. Djen. Polisi.

Varia berita singkat:

Ekonomi/Perdagangan Internasional

- AUSTRIA INGIN MEMPERLUAS PERDAGANGANNJA DENGAN INDONESIA:** Duta Besar Austria untuk Indonesia Dr. Friedrich Hohenbuehl mengatakan bahwa negaranya ingin memperluas hubungan dagangannya dengan Indonesia. Austria dapat mengekspor bermacam-macam hasil industri seperti traktor, generator, dan lain-lain ke Indonesia. Sebaliknya Austria dapat mengimpor kopra, kelapa sawit, teh, kopi dari Indonesia.
- PELELANGAN TEMBAKAU INDONESIA DI BREMEN:** Pelelangan terakhir dari tembakau Sumatra dilangsungkan pada tanggal 9 September dimana 6.446 karung tembakau akan ditawarkan. Pelelangan ini telah mendapat perhatian/kunjungan dari para pedagang dan pabrikan dari negeri Belanda, Denmark, Swiss, Jerman dan Inggris. Jumlah pelelangan dari tembakau Sumatra untuk tahun ini semuanya adalah 31.054 karung. Jumlah ini merupakan jumlah yang terbesar sedjak adanya pelelangan tembakau Indonesia di Bremen.
- KARET:**

INGGERIS: Konsumsi karet alam di Inggris menurun. Dalam bulan April yang lalu berdjumlah 14.900 ton. Dalam bulan Maret berdjumlah 16.700 ton. Sedangkan dibandingkan dengan bulan April tahun yang lalu berdjumlah 15.800 long ton.

Djumlah persediaan naik dari 27.900 long ton mendjadi 29.600 ton dan untuk bulan April 1964 djumlah tersebut mentjapai angka 25.400. Impor Inggris untuk karet alam untuk masa Djanuari-April tahun ini berdjumlah 70.160 long ton.

AMERIKA SERIKAT: Konsumsi karet baru (new rubber) Amerika Serikat dalam bulan Djuni yang lalu lebih tinggi dari pada dalam bulan Mei dan masih lebih tinggi dari konsumsi dalam bulan Djuni tahun yang lalu. Ini dapat kita lihat dalam daftar berikut:
- PHILIPPINA MENGIMPOR BERAS:** Baru ini Philippina mengimpor beras sebanyak 6.000 ton dari Amerika Serikat dan 4.000 dari Burma. Pemerintah Philippina telah memutuskan untuk mengimpor beras karena runnja produksi gandum dalam tahun ini.
- STATISTIK KARUNG GONI PERANTJIS**

Angka-angka ekspor-impor karung goni untuk bulan April dan Mei adalah sebagai berikut:

Ekspor	Mei 65	Mei 64	April
Negara ² Asing	617	556	66
Daerah ² Perantjis	900	657	1.05
Djumlah	1.571	1.213	1.71
I m p o r			
Goni kasar	4.161	7.693	4.80
- INTERNATIONAL FAIR DI IZMIR (TURKI)** International Fair yang ke-34 telah dibuka di Izmir dengan 35 negara peserta termasuk Indonesia, U.S.S.R., Bulgaria, Tjekoslawakia, Polandia, Rumania, Perantjis, Inggris, Amerika Serikat dan lain-lain.
- STATISTIK PERDAGANGAN INDONESIA BELANDA:** Angka² statistik menundjukkan bahwa hubungan dagang antara Indonesia dan Belanda menunjukkan kenaikan sedjak lhnja kembali hubungan diplomatik antara kedua negara. Angka² tersebut tidak menunjukkan kenaikan ekspor Belanda ke Indonesia tetapi malah ekspor Indonesia ke Belanda.

Dalam tahun 1962 Indonesia mengekspor 72.000 ton dengan harga F. 69.509 djuta. Belanda mengekspor 7.441 ton dengan harga F. 14.960 djuta.

Dalam tahun 1963 Indonesia mengekspor 105.513 ton dengan harga F. 55.490 djuta. Belanda mengekspor 53.351 ton dengan harga F. 31.534 djuta.

	Djuni 64*	Mei 65*	Djuni 65*
Djumlah karet baru yang dikonsumsi	165.944	163.167	168.122
Djumlah karet alam yang dikonsumsi	41.243	41.516	42.580
Djumlah karet sintetis yang dikonsumsi	124.701	121.651	125.542
Karet sintetis type "S" yang dikonsumsi	91.010	87.201	89.342
Produksi karet sintetis	146.935	155.606	144.927
Produksi karet sintetis type "S"	106.158	106.268	99.812
Ekspor karet sintetis	24.576	28.046	24.115

* dalam long ton.

Sedangkan dalam tahun jang lalu Indonesia mengekspor sedjumlah 1.327.586 ton dengan harga F. 344.296 djuta. Dan Belanda meng-ekspor seharga F. 43.017 djuta.

8. **INDUSTRI DI TIBET:** Tibet sekarang sudah mempunyai 67 pabrik. Sebelum tahun 51 Tibet tidak mempunyai seorangpun pekerdja industri. Daerah² otonom sekarang memproduksi barang-barang listrik dan mengerdjakan reparasi mesin-mesin.

9. **PRODUKSI GULA BRAZIL:** Produksi gula Brazil akan berkurang 1 djuta karung dari target jang sudah ditentukan oleh Instituto do Acucar Edo Elevol.

Penggilingan sudah dimulai pada tanggal 1 September dan produksinja dikira-kirakan ada sebanyak 105 djuta karung.

10. **AMERIKA SERIKAT MENGHAPUSKAN PEMBATAAN PENGANGKUTAN GANDUM KE UNI SOVJET:** Dalam waktu dekat ini Presiden Amerika Serikat Johnson akan mengeluarkan pengumuman tentang dihapuskan-nya pembatasan pengangkutan gandum ke Uni Sovjet dan negara-negara Sosialis lainnja. Pembatasan tersebut adalah bahwa 50% dari ekspor gandum ke Uni Sovjet itu harus di-angkut oleh kapal-kapal Amerika. Penghapu-

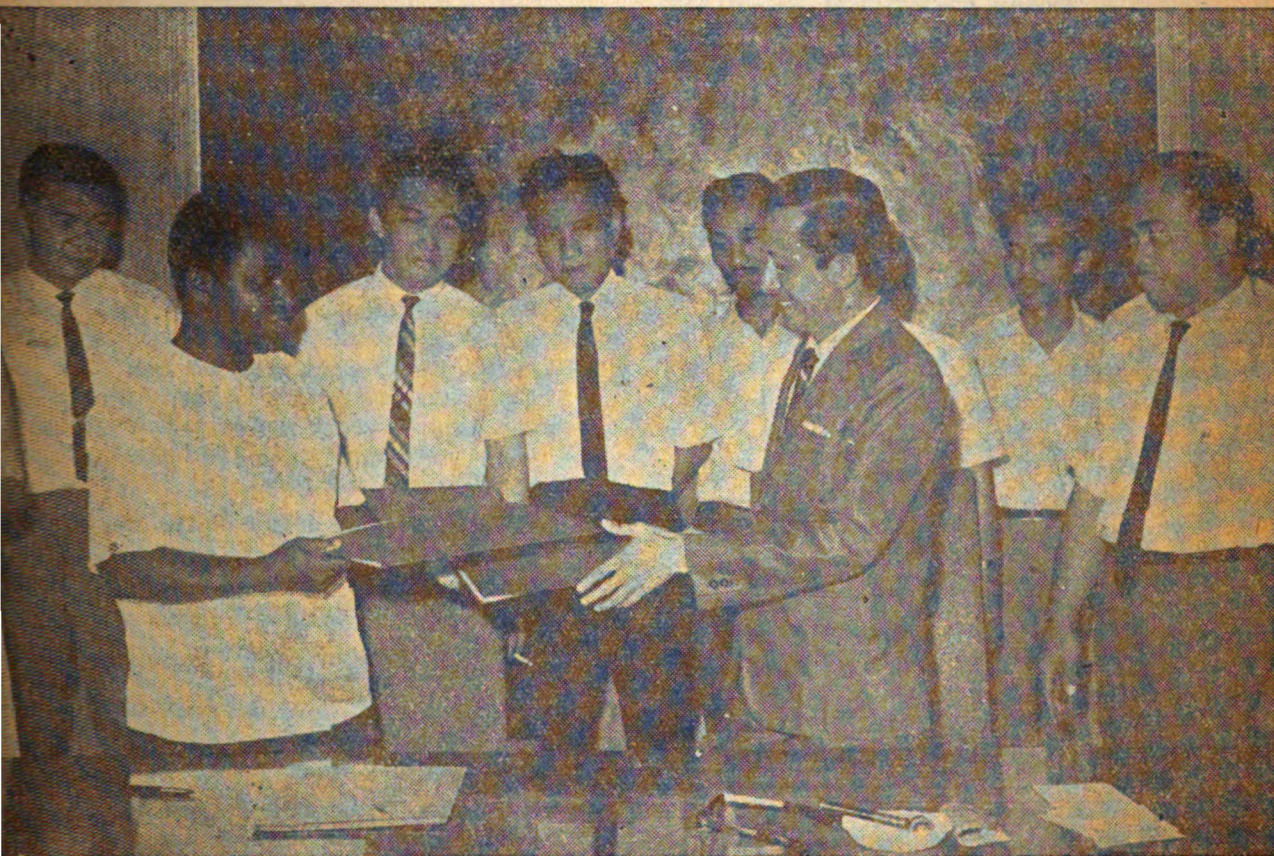
san ini akan berarti bahwa ekspor gandum Amerika ke-negara² Sosialis akan meningkat dan ini akan membawa perbaikan dalam neratja pembayaran Amerika Serikat.

11. **BANTUAN DAN GANDUM AMERIKA SERIKAT MEMBANDJIRI INDIA:** Amerika Serikat telah memperbesar bantuannja kepada India dengan djumlah \$ 6 billion untuk pembangunan ekonominja. Bantuan jang terbesar untuk tahun ini adalah untuk mengimpor barang-barang pertanian dan industri (ber-djumlah \$ 190 djuta).

Disamping itu Amerika Serikat telah mengi-rimkan gandum surplusnja sebanjak 9.000 metric ton ke-6 pedesaan di India sebelah Utara.

12. **KRISIS PERDAGANGAN INTERNASIONAL DIDAERAH STERLING MELUAS:** Krisis perdagangan internasional (ekspor dan impor) didaerah sterling meluas sebagai akibat krisis dari pada pound sterling dan penetrasi barang-barang Amerika dan beberapa negara Barat. Dalam 4 bulan pertama tahun 1965 ini ekspor dari negara² pound sterling berdjumlah 1.447 djuta pound sterling sedangkan impor mereka berdjumlah 1.867 djuta pound sterling, tidak termasuk negara² penghasil minjak di Timur Tengah.

rtukuran Naskah Perdandjian Dagang antara Indonesia dan Tanzania setelah ditanda-tangani oleh kedua belah pihak



Dibandingkan dengan djangkan waktu jang sama dalam tahun 1964 ekspor naik dengan 3½% sedangkan impor 14½% dan pada akhir tahun 1964 ekspor turun 1½% dan impor naik dengan 5½%.

13. PERDJANDJIAN DAGANG ANTARA INDONESIA DAN TANZANIA DITANDA TAGANI:

Perdjandjian dagang antara Indonesia dan Tanzania telah ditanda tangani baru-baru ini. Indonesia diwakili oleh Harmiel Sonda jang memimpin delegasi Indonesia pada pembitjaraan bilateral, sedangkan Tanzania diwakili oleh Ali M. Mivinygogo sebagai delegasi Tanzania. Dengan ditanda tanganinja perdjandjian dagang antara kedua negara, diharapkan perdagangan antara kedua negara akan meningkat dan berkembang dengan baik.

Dalam perundingan telah ditjapai persetujuan antara lain mengenai:

1. Pengiriman tjengkeh Zanzibar ke Indonesia:
Tahun 1965 3.000 ton £ 750.000
Tahun 1966 3.000 ton £ 750.000
2. Indonesia akan membeli tjengkeh selama 5 tahun jang akan datang.
3. Kemungkinan untuk memadjukan perdagangan dengan mengadakan suatu "TRIANGLE TRADE".
4. Memperkembangkan perdagangan antara Tanzania dan Indonesia lebih landjut.

Selandjutnja dalam rangka perundingan Tanzania dan Indonesia telah ditanda-tangani Commercial Contract (persetujuan dagang) antara Aneka Niaga II dan Zanzibar State Trade Co. delivery 3.000 ton tjengkeh dalam tahun ini.

14. AUSTRALIA LEBIH BANJAK MENGIMPOR:

Impor Australia berdjumlah \$ 2.902.000.000
Sedangkan Ekspornja \$ 2.635.600.000 *
Dan mengalami deficit
untuk tahun ini sebanjak \$ 26.400.000

* (sebelumnja berdjumlah 2.762.400.000).

15. PRODUKSI GULA EROPAH UNTUK MUSIM

1965/1966: Produksi gula bit Eropah berdjumlah 14.4 djuta metric ton. Angka ini didasarkan kepada perkiraan luas tanah dan hasil rata² dari 5 tahun jang terachir ini. Djumlah ini tidak termasuk Rusia. Angka untuk musim jang lalu adalah 13.9 djuto ton dibandingkan dengan djumlah achir 15.8 jang berupa nilai kotor. Walaupun baru² ini ada perbaikan dalam tjara dan lain-lain produksi untuk musim ini tidak akan melebihi rata²nja dan angka kalkulasi untuk produksi gula berada dipihak jang tinggi.

16. MODAL AMERIKA SERIKAT MERADJALELA DI COLUMBIA: Dalam tahun 1964 djumlah modal Amerika Serikat jang beroperasi di Columbia berdjumlah US \$ 465.000.000 atau 5 kali lipat dari pada djumlah modalnja dalam tahun 1961. Modal Amerika Serikat tersebut mula² bergerak dibidang perminjangan dan industri logam mulia, tapi sekarang sudah menjelusup ke-bidang² sandang pangan, farmasi, bangunan, perdagangan, keuangan, pengangkutan laut dan udara.

Disamping adanja kongsi² modal tunggal Amerika Serikat, sekarang ini tumbuh djuga modal² tjampuran jang disebut mixed investment, joint enterprise, development corporation, financial corporation, dan lain-lain.

Dengan menguasai kuntji sektor perekonomian di Columbia ini, modal² Amerika Serikat telah mendjadi penguasa atas Columbia. Columbia dewasa ini menanggung hutang luar negeri sebesar \$ 1.400.000.000, djumlah penganggur ada 600.000 orang. Ditahun jang lalu Columbia harus mendevaluasikan mata uangnja dengan 50% sedangkan tingkat inflasi tiap tahunnja adalah 20%.

Columbia jang selama ini dinjatakan sebagai medja pameran bagi apa jang disebut "persetujuan untuk kemandjuaan" njatanja „hanja" memberikan hak² istimewa kepada modal² Amerika Serikat sadja. Menurut persetujuan tahun 1962 modal Amerika Serikat di Columbia dinjatakan bebas dari kemungkinan diambil alih.

17. HARGA MELONDJAK DI JUGOSLAVIA

Pada waktu achir² ini harga² di Jugoslavia melondjak keras, jang menjulitkan kehidupan rakjat. Pada tanggal 24 Djuli jang lalu, Dewan Eksekutif Federal Jugoslavia telah mendekritkan harga² baru bagi barang² dan bahwa se-telah ini harga² melondjak keras melampaui batas harga jang resmi.

Di Beograd diberitakan bahwa harga tepung terigu, roti, susu telah meningkat dari 40% sampai 105% dibandingkan dengan harganja sebelum dekrit itu diumumkan.

Kenaikan tadjam dalam taraf hidup menjebatkan makin merosotnja daja beli rakjat. Perdagangan etjeran di Beograd telah merosot dari 18 sampai 22% setelah kenaikan harga jang tadjam itu.

Keputusan Pemerintah Jugoslavia untuk menaikkan harga² adalah salah satu tindakan penting dalam perubahan ekonomi jang sekarang.

sedang didjalankan di Jugoslavia. Tindakan ini adalah suatu langkah lebih lanjut kearah suatu ekonomi kapitalis "bebas". Wakil Presiden Dewan Eksekutif Federal Jugoslavia Baris Krajger setjara tegas menjatakan bahwa "perubahan harga" berarti dilepasnja sistim harga² beku dan diachirinja tjampur tangan pemerintah dengan harga².

8. **URUGUAY GADAIKAN TJADANGAN EMAS-**tekanan kreditur² Amerika Serikat, Dewan tekanan kreditor² Amerika Serikat, Dewan Nasional Uruguay baru² ini terpaksa menje-tudjuai untuk menghipotekkan 50 djuta dollar dari tjadangan emas Bank Republik kepada bank² swasta jang tertentu di New York agar pembajaran hutang² luar negeri Uruguay dapat ditunda. Surat² kabar di Montevideo berpendapat bahwa sjarat² kedjam jang ditetapkan oleh bank² Amerika Serikat itu mempunjai pengaruh jang sangat merugikan bagi Uruguay karena tjadangan² emas achirnja tidak boleh diganggu gugat atau dipakai ketju-ali terdjadi sesuatu kebangkrutan finansiel.

Hutang Uruguay kepada bank² itu berdjumlah 58 djuta dollar. Berdasarkan persetudjuan, 8½ djuta dollar dari djumlah tersebut harus segera dibajar kembali, 12½ djuta dapat dibajar setjara angsuran selama 5 tahun dan sisanja sebanjak 37 djuta lagi harus dibajar kembali dalam tempo 10 tahun. Hutang dollar Uruguay menurut perkiraan berdjumlah sekitar 400 djuta dollar, 170 djuta lebih sudah sampai waktunja untuk dibajar kembali. Disamping bank² swasta Amerika Serikat, Uruguay djuga berhutang kepada Organisasi² resmi Amerika Serikat, Dana Moneter International, Bank² Eropah Barat. Achir² ini Amerika Serikat sudah mendesak Uruguay supaja membajar kembali hutang-hutangnja.

19. **LARANGAN IMPOR BARANG² DJEPANG KETJUALI TEKSTIL DI NIGERIA:** Pemerintah Nigeria telah mengeluarkan peraturan jang melarang semua impor barang² Djepang ketjuali tekstil. Keputusan itu diambil sesudah mempeladjadi Neratja Pembajaran Nigeria pada umumnja dan Neratja Perdagangan jang tidak menggembirakan antara Nigeria dengan Djepang.

Para Diplomat Djepang di Afrika dalam suatu konperensinja berpendapat penambahan kredit adalah djalan jang paling efektif untuk memperbaiki Neratja Perdagangan antara Djepang dengan Negara² Afrika.

Konperensi selandjutnja mentjatat penghalang terbesar bagi kelantaran perdagangan Djepang dengan negara² Afrika adalah kelebihan ekspor Djepang. Sebagai langkah kongkrit jang terachir dari Pemerintah Djepang diharapkan akan menawarkan pindjaman kredit yen kepada Tanzania sebanjak 1.000.000 pound sterling. Pindjaman kredit dalam djumlah jang sama sudah pula ditawarkan kepada Uganda, dimana tawaran tersebut diterima dengan baik.

20. **BIRMA BUAT SENDIRI BAHAN BAKAR DJET:** Bahan bakar djet jang digunakan untuk Angkatan Udara Birma jang diimpor dari luar negeri, sekarang sudah mulai dibuat sendiri didistrik Sirian, suatu pusat produksi minjak.

Satu tangki dari beton dengan kapasitas satu gallon untuk menimbun bahan bakar itu dan satu tangki dengan kapasitas 6 djuta gallon untuk minjak mentah sedang dalam pembangunan. Bahan bakar untuk pesawat² terbang djet transpor sipil djuga sedang diprodusir di Sirian.

21. **PRODUKSI TEH DUNIA:** Dibawah ini adalah daftar jang menundjukkan angka² produksi teh dari beberapa daerah penghasil teh (dalam djutaan lb.):

	Selama bulan	1965	1964	Djumlah	1965	1964
India Utara	Djuli	98.2	98.5	Apr/Djuli	228.6	227.1
India Selatan	"	• 19.4	16.9	Djan/Djun	* 107.0	87.3
Pakistan	"	8.1	8.5	Apr/Djuli	22.6	25.0
Ceylon	Djuni	45.0	42.0	Djan/Djun	266.6	267.7
Indonesia	Djan.	7.3	7.1	Djanuari	7.3	7.1
Malawi	M e i	2.1	1.7	Djan/Mei	17.8	20.8
Kenya, Uganda, Tanjika	Djuni	5.4	4.9	Djan/Djun	35.1	39.5
Portugis (Afrika Selatan)	"	1.4	1.0	"	17.3	17.4

* Angka-angka sementara.

P. N. DHARMA NIAGA

IMPOR : Mesin² untuk Pertjetakan — Industri — Pertanian — Perkebunan — Tekstil.

Mesin² Perkakas — Pendingin — Minjak Kelapa — Pompa² dan Mesin untuk Pembangunan.

Alat² Besar — Kereta Api — Mesin² Pertambangan Clark Forklifts. Mesin² DIESEL/Generating sets — Alat² RADIO/elektronik/Telekomunikasi dan motor² listrik.

PERDAGANGAN UMUM : Dalam Negeri/Antar Pulau.

INSTALASI : Telepon dan listrik dengan tenaga² Ahli.

PERBENGKELAN : Service dan pemasangan mesin.

Kantor Pusat :

Djalan Tanah Abang Barat 6 - 8 - 10 — Djakarta.
P.O. Box 2028 — Tel. 47557 - 47577 - 49978 - 41974
Telex 292

Kantor Tjabang Djakarta

Djalan Djembatan Batu 50 — Tel. 22041 22042 - 22043 - 22044
Djakarta Kota.

Tjabang-Tjabang :

BANDUNG — SEMARANG — SURABAJA — MEDAN —
PONTIANAK — PALEMBANG — TJIREBON — JOGJA-
KARTA — MALANG — DJEMBER — BANDJARMASIN —
MAKASSAR — MENADO — AMBON — DENPASAR —
BANDA ATJEH — PADANG dan PAKANBARU.

Varia berita singkat:

Ekonomi/Perdagangan Dalam Negeri

Pengintegrasian Bank-Bank Pemerintah diresmikan

Pengintegrasian Bank-Bank Pemerintah kedalam satu bank tunggal yang oleh Presiden telah diberikan nama BANK NEGARA INDONESIA telah diresmikan dalam sebuah upatjara pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 1965. Adapun bank-bank yang diintegrasikan itu adalah: Bank Indonesia, Bank Operasi, Tani dan Nelajan, Bank Umum Negara dan Bank Negara Indonesia. Pengintegrasian itu berlaku sedjak tanggal 17 Agustus 1965, jaitu bertepatan dengan djatuhnja Peringatan Dwidadasawarsa Proklamasi Kemerdekaan R.I. ke-XX.

Indonesia mempunyai 40.000 djenis tumbuh-tumbuhan

Indonesia yang terdiri dari ribuan kepulauan yang membudjur dari Sabang sampai ke Merauke merupakan satu negara yang kaya dengan hasil alamnja mempunyai 40.000 djenis tumbuh-tumbuhan dan 90.000 djenis binatang. Yang baru diselidiki dan yang sudah diketahui baru 20.000 djenis tumbuh-tumbuhan dan 15.000 djenis binatang.

Kulit katjang, ampas tebu dan batang djagung untuk hardboard

Setelah diadakan research oleh kaum sardjana dan tidak sardjana, maka kulit katjang, ampas tebu dan batang djagung kini dapat dimanfaatkan menjadi hardbord. Dengan hasil yang telah diapai sekarang ini, kita tidak usah lagi mengimpor hardboard, karena sudah dapat dibuat didalam negeri.

Sekam padi dapat dijadikan lensa.

Sekam padi dewasa ini dapat dijadikan lensa. Pembuatan lensa yang berasal dari sekam ini dilakukan oleh Djawatan Geologi dan Pertambangan dan telah mendapat hasil yang memuaskan. Tinggal lagi sekarang usaha untuk menghaluskan lensa tersebut jaitu untuk dapat dipergunakan sebagai lensa teropong dan lensa kamera. Dengan berdiri disegala bidang, maka lensa-lensa inipun tidak perlu lagi kita impor, karena kwalitanja tidak kalah dengan apa yang dihasilkan dari luar negeri.

Kerajinan perak.

Hasil kerajinan perak dari Jogjakarta sebagai hasil ekspor yang hasil produksi perak disempurkan yang dibuat di Indonesia, tidak akan kalah dengan buatan luar negeri.

6. Minjak rem buatan Lombok.

Di Lombok Barat dewasa ini telah berhasil dibuat minjak rem, yang penting artinya bagi keperluan kendaraan bermotor. Minjak ini dibuat dengan bahan biji djarak.

Dewasa ini di Daerah-Daerah Tingkat II Nusa Tenggara Barat oleh Pemerintah (Dinas Pertanian Rakjat) dan oleh pengusaha swasta telah dilaksanakan perluasan penanaman djarak.

7. Pembantu Menko Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin.

Dengan Keputusan Presiden R.I. No. 239 Tahun 1965 tanggal 29 Agustus 1965 telah ditetapkan pengangkatan Pembantu-Pembantu Menteri Koordinator Pelaksanaan Ekonomi Terpimpin sebagai berikut:

- a. Drs ek. Achmad Ramli Harahap untuk Urusan Umum.
 - b. Ir Abdul Rivai Saad untuk Urusan Produksi.
 - c. Drs ek. Gunadi Nitimihardjo untuk Urusan Perdagangan/Distribusi.
 - d. Drs ek. Priasmoro Prawiroardjo untuk Urusan Moneter.
 - e. Brigdjen MMR Kartakusumah untuk Urusan Prasarana.
 - f. Letkol. (pensiun) Subeno untuk urusan Pengerahan Tenaga dan Daja.
8. **R.A. Kartadjoemena S.H. Direktur Bank Negara Indonesia.**

Dengan Keputusan Presiden R.I. No. 237 Tahun 1965 tanggal 26 Agustus 1965 yang mulai berlaku terhitung tanggal 1 Djuli 1965 telah ditetapkan pengangkatan R.A. Kartadjoemena S.H. sebagai Direktur bank tunggal Bank Negara Indonesia.

9. Stand-stand Pekanbaru Nasional Dwidawasarsa Kemerdekaan yang mendapat penghargaan.

Adapun stand-stand yang mendapat penghargaan, yang mendapat surat-surat piagam menurut keputusan juri dapat dianggap memenuhi sjarat-sjarat dan sesuai dengan thema pokok jaitu pembangunan dan Berdikari, pada Pekanbaru Nasional Dwidawasarsa Kemerdekaan R.I. di Jogjakarta adalah sebagai berikut:

- Djuara Pertama: Industri Kimia
- Djuara Kedua: Mesin Listrik

- Juara Ketiga: Perusahaan Niaga Negara
- Juara Harapan: Departemen Penerangan, Angkatan Bersendjata R.I.

10. Lima buah Perusahaan Negara dilingkungan Pelabuhan Tandjungperak diresmikan.

Lima buah Perusahaan Negara dilingkungan Pelabuhan Tandjungperak Surabaya yang berada dibawah naungan Kompartimen Perhubungan Laut, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 1965 telah diresmikan. Perusahaan-Perusahaan Negara tersebut adalah:

- a. P.N. Varuna Tirata Prakasja: mengerdjakan ekspedisi muatan laut.
- b. P.N. Kodja, bekerdja dibidang logistik dan distribusi alat-alat kapal.
- c. P.N. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI): bertugas menampung survey dan mengurus konstruksi-konstruksi kapal guna mendjamin keselamatan kapal muatan kapal dan penumpang kapal.
- d. Kantor Pengawasan Penjelesaian Claim (Kap-pelaim): mengurus persoalan bidang pengiriman dan penerimaan barang.
- e. Kantor Penjelesaian Transshipment (P.N. Kap-tranship): mengurus kelantjaran angkutan barang luar negeri atau sebaliknya.

11. Penandatanganan pembuatan pesawat terbang.

Pada Hari Djum'at pagi tanggal 20 Agustus 1965 telah ditandatangani kontrak pembuatan seratus buah pesawat terbang Fokker Friendship F27 di Istana Merdeka. Penandatanganan kontrak tersebut dilakukan oleh Menteri Panglima Angkatan Udara LAKSAMANA MADYA UDARA OMAR DHANI dari pihak Indonesia dan dari pihak Belanda adalah dari Fokker serta Swolsman Concern. Presiden SUKARNO selaku Ketua Dewan Penerbangan dan Angkasa Luar R.I. menandatangani sebagai saksi.

Dengan pembuatan pesawat terbang Fokker F27 sebanyak 100 buah ini maka Indonesia akan mempunyai sebuah pabrik dalam djangka waktu 3½ tahun ini. Pabrik tersebut akan bernama Pabrik Penerbangan BERDIKARI.

Mengenai pelaksanaan pembangunan industri pesawat terbang ini dilaksanakan oleh Komando Pelaksanaan Projek Industri Penerbangan (Kopelapip). Pembiayaan pembangunan tersebut dilakukan dengan suatu export operation yang dilakukan oleh P.T. IMERMOTOR dibawah pimpinan Kurwet Kartaadiredja dan Pusat Koperasi Angkatan Udara - PUKADARA. (Lihat W.P. No. 7 hal. 36).

12. Rehabilitasi pabrik-pabrik gula ditandatangani.

Pada hari Selasa tanggal 31 Agustus telah ditandatangani kontrak antara B.P.U.-P.P.N. GULA dan MACHINEFABRIEK/N.V. Amsterdam untuk rehabilitasi 36 Pabrik gula di Indonesia. Djuga sebelumnya telah ditandatangani untuk tudjuan

yang sama antara BPU-PPN Gula dengan "Storwerkspoor" Belanda. Penandatanganan ini adalah dalam rangka kredit 100 djuta gulden dari Negeri Belanda untuk R.I. yang djatah untuk PPN Gula sebesar 12 djuta gulden.

13. 100% muatan sudah dapat diawasi BIPALINDO.

Sekarang ini seratus persen muatan kapal dalam pelajaran Samudra kita sudah dapat diawasi oleh Bipalindo. Dalam tahun 1965, ini 15% dari volume tersebut telah diangkut dengan kapal-kapal nasional djika dibandingkan dalam tahun 1964 baru 7% dari volume impor/eksport.

14. Pembantu Menteri Pengairan Dasar.

Dengan Keputusan Presiden R.I. No. 223 Tahun 1965 telah ditetapkan pengangkatan Pembantu Pembantu Menteri Pengairan Dasar sebagai berikut:

- a. Brigdjen Pol. Drs Ostenrik Tjitrosunarjo dari Dep. Angkatan Kepolisian, untuk bidang Mental dan Pengawasan.
- b. Ir Humalatua Nainggolan dari Kompartimen Pekerdjaan Umum dan Tenaga untuk bidang Perentjanaan dan Pengawasan.
- c. Ir Sud Sujono dari ex Departemen P.U.T. untuk bidang Pengembangan.
- d. Letkol Ir Sugeng Hidajat dari Dep. A.L. untuk bidang Operasi dan Logistik.

15. Nama baru toko-toko Sarinah.

Tanggal 17 Agustus 1965 dalam rangka Dwidarasawarsa Kemerdekaan R.I. P.T. Departement Store Indonesia SARINAH telah mengganti nama-nama tokonja di Djakarta, Bandung dan Surabaya.

Toko OBOR BARU Djakarta mendjadi SARINAH NUSANTARA, Toko Luwes mendjadi SARINAH TJKINI, Toko International Shop mendjadi SARINAH INTERNATIONAL SHOP, Toko Margadjuwita mendjadi SARINAH MADJAPAHIT; Toko Obor Baru, Bandung mendjadi SARINAH BANDUNG, Toko Obor Baru, Surabaya mendjadi SARINAH SURABAJA.

16. Batubara Indonesia.

Reserve Batubara Indonesia berdjumlah ± 45 djuta ton yang bermutu baik, sedangkan yang bermutu rendah ditaksir bermiljar-miljar ton.

Produksi batubara Indonesia dalam tahun 1965 berdjumlah 446.262 ton sedangkan sebelum perang dunia ke-II produksinja ± 2.000.000 ton. Kalau produksi dinaikkan sampai 4 djuta ton setiap tahun sesuai dengan Rentjana Produksi ± tahun 1970, maka reserve batubara Indonesia akan cukup untuk ratusan tahun djika dibanding dengan reserve minjak bumi kita paling lama (dengan produksi seperti sekarang hanya mentjukupi untuk l.k. 60 tahun lagi).

17. Angka-angka ekspor kaju Perhutani Djawa Timur.

Angka-angka realisasi ekspor jang telah berdjalan untuk tahun 1962: Logs sebanjak 279,56 M³ dan Conversion 186,483 M³; tahun 1963: logs 600,82 M³ dan Conversion 1073,892 M³; dan pada tahun 1964: logs 694,190 M³ serta Conversion 198,314 M³.

Untuk mempertinggi nilai kaju ekspor, Perhutani Djatim telah mengadakan usaha pengawetan saju terhadap faktor-faktor pengrusak tjendawan, serang dan lain-lainnja.

18. Pertjobaan KONATAL hasilkan 8½ ton besi mentah.

Sedjak bulan Mei j.l dalam laboratorium Komando Penatalan Angkatan Laut (KONATAL) di Surabaya telah diadakan pertjobaan-pertjobaan jang menghasilkan lebih kurang 8½ ton besi mentah jang siap untuk dipakai dalam industri pengetjoran barang-barang dari besi. Blok-blok besi mentah hasil KONATAL ini telah turut pula dalam pameran research nasional di Gedung Pola Djakarta. Dengan demikian diharapkan bertambahnja kepertjajaan rakjat akan kemampuan kita untuk berdikari dalam perindustrian besi.

Dalam pertjobaan-pertjobaan tersebut digunakan bahan-bahan jang semuanya merupakan hasil kekaan bumi Indonesia.

19. Djumlah alat-alat tenun diseluruh Indonesia.

Menurut Wakil Ketua OPS Pertekstilan Pusat, Indonesia terdapat 20 sampai 25.000 buah alat-alat tenun mesin dan 400.000 sampai kurang lebih satu djuta buah bukan mesin (ATBM) belum termasuk pertekstilan jang dimiliki oleh Negara.

20. Tanaman Soba akan diperluas di Djatim dan Djateng.

Soba sebagai tanaman djenis penggalian baru telah menunjukkan manfaatnja bagi peningkatan hasil pangan disamping beras dan palawidja dan oleh karenanja direntjanakan dapat memperluas tanaman tersebut didaerah-daerah pertanian di Jawa Timur dan Djateng.

Soba merupakan tanaman perdu (rumpun) jang bitnja berasal dari Djepang dan dapat tumbuh subur dipegunungan. Dalam 70 hari sampai 80 hari sudah dapat dipungut hasilnja. Bidji soba dapat dibuat tepung atau direbus sebagai pengganti nasi.

Tanaman soba dikemudian hari akan besar manfaatnja dalam usaha melaksanakan prinsip berdikari untuk pengurangan impor gandum dari luar negeri.

21. Kotoran kuda untuk membuat "tjetakan".

Kotoran kuda jang biasanja kita pergunakan untuk pupuk tanaman, ternjata dipakai sebagai salah satu bahan tjampuran dalam pembuatan tjetakan pada industri pengetjoran barang-barang

dari besi dan logam lainnja. Kotoran kuda tab. menjebabkan poreusnja (berpori) tjetakan tersebut sehingga dengan demikian dapat dihindari kemungkinan retaknja barang-barang dari logam jang ditjetak didalamnya. Hal ini disaksikan sendiri oleh Menteri Perindustrian Maritim beserta rombongan ketika mengundjungi Komando Penatalan Angkatan Laut di Surabaya (KONATAL).

22. Indonesia sanggup berdikari dibidang aspal.

Kepala Perusahaan Aspal Negara tjabang Banabungi, Buton menjatakan kejakinannja, apabila rentjana Departemen Bina Marga untuk membuka tambang-tambang aspal baru dibeberapa tempat dipulau Buton sudah dapat direalisasikan, maka kita akan dapat berdikari dalam hal aspal dan tak perlu mengimpor lagi dari luar negeri.

Pada waktu ini, dipulau Buton terdapat sebuah tambang aspal, yakni di Kabungka jang dapat memproduksi 1.500 ton aspal setahunnja. Djenis aspal ini disebut batu jang beraspal dan dikenal dengan nama Butas (Buton Asphalt) jang mempunyai kadar aspal 35%.

23. Rayon hasilkarya Balai Rayon.

Menteri Perindustrian Dasar Hadi Tajeb dan Kepala Balai Rayon Ir Gardjito, Kamis pagi tanggal 9 Sept. 1965 telah menjerahkan hasil karya Balai Rayon jang pertama kepada Presiden Sukarno. Hasil karya jang pertama itu berupa enam meter rayon jang dihasilkan sendiri oleh Balai Rayon dan kemudian ditunen sendiri dengan alat tenun tangan. Balai Rayon telah beberapa tahun lamanja mengadakan penjelidikan pembuatan rayon dari berbagai djenis kaju jang mengandung selulose jang achirnja ternjata bahwa kaju karet Hevea di Indonesia mengandung banjak selulose.

Selain rayon, maka Balai Rayon dalam rangka kerdjasama dengan I.T.B. sedang menjelidiki bahan sandang dari batu ialah polyphenyl alcohol jang dewasa ini telah menunjukkan hasil jang baik. Dengan demikian dalam waktu singkat Indonesia telah dapat menambah bahan sandangnja dari rayon dan dari bahan sematjam batu.

24. Pekan raya Dwidasawarsa untung hampir 28 djuta rupiah.

Pekanraya Dwidasawarsa Kemerdekaan R.I. di Jogjakarta jang berlangsung dari tanggal 29 Djuni 1965 s/d 22 Agustus 1965 telah menghasilkan keuntungan jang diperkirakan Rp. 27.892.507,15. Pemasukan uang seluruhnja berdjumlah Rp. 110.095.006,80 dan pengeluarannja Rp. 82.202.499,65. Hasil ini belum diperhitungkan bangunan-bangunan jang meliputi BPU Mesin/Listrik, BPU Niaga, Industri Kimia-Pupuk, Dep. Kehutanan dllnja.

25. Pelabuhan Trisakti Bandjarmasin.

Pada tanggal 10 September 1965 telah diresmikan pelabuhan baru Bandjarmasin jang diberi nama "Pelabuhan Trisakti" oleh Wakil Perdana Menteri II Lr J. Leimena.

P. T. K A R K A M

(P.T. KULIT ATJEH RAYA KAPTEN MARKAM)

KANTOR PUSAT : Djl. Pintubesar Selatan 97 atas Djakarta-Kota
Tilpon 23368 - 22644 - 21092
alamat kawat : **KARKAM DJAKARTA**

KANTOR TJABANG : **M E D A N**
P e k a n b a r u
D u m a i
R e n g a t
D j a m b i

KANTOR PERWAKILAN : **T e m b i l a h a n**
B e n g k a l i s
P a l e m b a n g
S i b o l g a

PPN P.T. KARKAM : **A e r m o l e k (R i a u)**
Perusahaan Remilling P.T. KARKAM : **Kampung Lalang Sunggal**
(Sumatra Utara)

EXPORTIR : **K A R E T**
K O P R A
dan hasil perkebunan lainnya

IMPORTIR : **BARANG² KEPERLUAN PEMBANGUNAN**
KENDARAAN²
MESIN² DIESEL
untuk berbagai matjam keperluan
MESIN² KAPAL

• • •

BANK² KAMI IALAH : **BANK INDONESIA**
BANK NEGARA INDONESIA
BANK DAGANG NEGARA
BANK KOPERASI TANI & NELAJAN

• • •

•• Dalam rangka „hanting setir” untuk „berdikari” dibidang ekonomi dan pembangunan,
P.T. KARKAM melaksanakan kegiatan²-nja semata-mata untuk membantu Pemerintah.

•• Semboian kami ”MADIU TERUS PANTANG MUNDUR” UNTUK KEMENANGAN
REVOLUSI dan UNTUK TERTJAPAINJA MASJARAKAT SOSIALIS INDONESIA.

PENGUMUMAN-PENGUMUMAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI/URUSAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Mulai tanggal 28 Agustus 1965 tanpa SIPAP untuk KAIN BATIK.

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden/Inglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. Instr. 2/KOTOE Tahun 1962, perlu dihindarkan segala rintangan yang menghambat peredaran barang-barang dalam pengawasan. Bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan pengawasan baru dari barang-barang Dalam pengawasan Dalam Daerah Pabean Indonesia sebagaimana tertantum dalam Daftar I Lampiran Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 4 Agustus 1962 No. 142/M/SK/62.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 0111/MPDN/SK/65 tanggal 28 Agustus 1965 ditetapkan mentahabut/mengeluarkan barang yang "KAIN BATIK" dari Daftar I Lampiran Keputusan Menteri Perdagangan No. 142/M/SK/62 tanggal 4 Agustus 1962 tentang Pengangkutan Barang-barang Dalam Pengawasan Daerah Pabean Indonesia.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 1965. Diadi dengan kata lain badan yang "KAIN BATIK" sediak tanggal tsb. untuk pengangkutan/pengeluaran dalam daerah Pabean Indonesia melalui udara dan laut tidak memerlukan SIPAP (Surat Izin Pengangkutan Antar Pulau).

SIPAP Kopra dari Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.

Di daerah Tingkat I Sulawesi Tengah telah ditunjuk Perwakilan Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri dan berkedudukan di Palu.

Sebelum membentuk Perwakilan tersebut, pemilihan SIPAP untuk kopra antar pulau dari Daerah Sulawesi Tengah dikeluarkan oleh Direktorat Ekspor Tjabung (DEKT) di Manado.

Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas maka mulai tanggal 1 September 1965 pengeluaran/pemilihan SIPAP (Surat Izin Pengangkutan Antar-pulau) untuk keperluan:

pengangkutan kopra antara pulau dari Sulawesi Tengah ke Djawa — untuk konsumsi dalam negeri,

pengangkutan kopra antar pulau dari Sulawesi Tengah ke Manado/Bitung — untuk akumulasi ekspor,

yang semula diberikan oleh Direktorat Ekspor Tjabung (DEKT) Manado diindahkan dan dikeluarkan oleh Seksi Ekspor pada Perwakilan Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri di Palu dan Tjabung Direktorat Ekspor di Donggala.

3. Tatakerdja antara Departemen Perdagangan di tingkat Nasional Perwakilan Departemen Perdagangan/Urusan Perdagangan Luar Negeri di tingkat Daerah Tingkat I.

Dengan Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri tanggal 3 September 1965 No. 114/MPDN/SK/65 telah ditetapkan tatakerdja antara Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri dengan Perwakilan Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri di Daerah-Daerah Tingkat I sebagai berikut:

a. Kepala Perwakilan Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri (selanjutnya disebut Kepala Perwakilan) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung-djawab kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri (selanjutnya disebut Menteri).

b. Kepala Perwakilan menerima instruksi dari Menteri/Pembantu Utama dan atau Kepala Direktorat yang bertindak atas nama Menteri, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing Kepala Direktorat.

c. Tugas Kepala Perwakilan:

- 1) Mengirim / menjampaikan laporan-laporan / surat-surat perihal pelaksanaan tugasnya kepada Menteri/Pembantu Utama Menteri.
- 2) Bila laporan-laporan/surat-surat tersebut diatas tidak bersifat prinsipil, maka laporan-laporan/surat-surat termaksud dialamatkan kepada Menteri untuk perhatian Kepala Direktorat yang bersangkutan.
- 3) Menetapkan lebih lanjut tatakerdja didalam lingkungan Organisasi Perwakilan tersebut.
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Perwakilan dapat mendelegasikan wewenangnnya kepada Kepala Bagian/Kepala Seksi/Kepala Tjabung.

R A L A T :

Dalam Warta Perdagangan No. 9 halaman 32 dan 33, mengenai Pengumuman² Departemen Perdagangan, terdapat kesalahan-kesalahan sebagai berikut :

- Pedagang ketil/etieran sebanjak Rp. 1.000.— /setahunnia, seharusnya Rp. 1.500.— /setahunnia.
- Pengumuman² DPDN tgl. 29 Agustus 1965. No 3415/H-I-O/DPDN/P, seharusnya, tgl. 29 Agustus 1958.
- Lembaga Penialuran Perusahaan, seharusnya Lembaga Penialuran Perdagangan.
- DRIGDJEN Achmad Jusuf, seharusnya BRIGDJEN Achmad Jusuf.

Dengan demikian kesalahan telah kami betulkan.

REDAKSI.

Uganda

Uganda adalah sebuah negara merdeka dalam lingkungan Persemakmuran Inggris. Letaknja di Afrika Timur. Besarnja lebih kurang sama dengan Inggris (243.400 kilometer persegi). Penduduknja lebih dari tujuh djuta, terdiri, dari beberapa bangsa — Baganda, Banyankole Iteso dan Basoga. Dengan danau-danaunja jang indah, pegunungan-pegumungannja jang tinggi dan bukit-bukitnja jang hidjau, Uganda sering digambarkan sebagai „mutiara” dari Afrika.

Uganda merupakan sebuah federasi dari empat keradjaan — Buganda, Bunyoro, Toro dan Ankole, delapan distrik federal — Karamoja, Acholi, Lango, Nile Barat, Bugisu, Teso, Bukedi dan Kigezi, dan satu wilajah federal — Busoga. Setjara administratif keradjaan-keradjaan tadi dibagi dalam daerah-daerah (saza), distrik-distrik (gombolola) dan parish-parish — bagian negara jang mempunyai geredja dan pendetanja sendiri (miruki).

Keradjaan terbesar dari empat keradjaan tadi, Buganda, meliputi hampir seperempat wilajah negara dan mempunyai hak-hak otonomi jang lebih besar. Radjanja, Kabaka, dipilih oleh Lukiko, atau Parlemen, dan pemerintahnja terdiri dari enam orang menteri dibawah pimpinan Katikkiro (Perdana Menteri).

Badan legislatifnja, Dewan Nasional, dipilih dengan pemilihan umum (jang berhak memilih ialah warganegara jang berumur 21 tahun keatas). Dewan Nasional memilih Presiden. Semua Menteri harus mendjadi anggota Dewan Nasional.

Negara Tertua.

Uganda adalah salah satu dari negara Afrika jang tertua dan salah satu negara terkaja dibidang kebudayaan. Negara feodal — Kitara Buganda dan lain-lainnja — terbentuk disini pada abad-

abad pertengahan. Dalam pertengahan ke-19 dari abad terachir Uganda mendjadi objek pertentangan sengit antara Inggris dan Djerman. Pada tahun 1890 Uganda dbawah djadjahan Inggris dan pada tahun 1896 diumumkan sebagai daerah protektorat Inggris.

Gerakan anti-pendjadjahan dimulai pada pertengahan akhir-akhir abad jang lalu, tetapi mendjadi nyata sekali setelah Perang Dunia Kedua. Peristiwa-peristiwa penting dari gerakan kemerdekaan ini ialah pemogokan umum di Buganda pada tahun 1945, pemberontakan rakjat tahun 1961 dan dibentuknja Kongres Rakjat Uganda pada bulan Maret 1960.

Kongres Rakjat menjatukan unsur-unsur utama dalam masjarakat — buruh, tani, tjernak, dan kiawan-tjendekiawan progresif dan unsur radikal dari bordjuasi nasional — dalam perjuangannya menentang kolonialisme. Kongres Rakjat menentang pemilihan untuk Dewan Nasional pada bulan April 1962 dalam persekutuannja dengan partai Buganda Kabaka Yekka (Eka Kabaka). Pemerintahan baru jang dibentuk oleh Dr Milton Obote, pemimpin Kongres, telah menuntut kemerdekaan bagi negeranja setjepat mungkin.

Achirnja London memberikan kemerdekaan pada itu dan 9 Oktober 1962 bendera Uganda dinobatkan di Kampala, ibukota Uganda. Kemerdekaan membuka kesempatan-kesempatan jang luas pada Uganda untuk melakukan pembangunan ekonomi, perbaikan pendidikan dan fasilitas kesehatan serta membuat lebih kokohnya persatuan nasional.

Hasil utama kopi dan kapas.

Uganda adalah penghasil utama kopi dan kapas, jang merupakan bahan ekspor terpenting dari negara itu. Kesedjahteraan dari rakjat

ni tergantung atas harga kedua hasil utama di dipasaran, tetapi keduanya masih dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan asing pada mulanya. Tetapi sekarang situasinya sudah berubah.

Pemerintah telah melakukan usaha-usaha khusus untuk menghilangkan ketergantungan penduduk kaum tani dari satu jenis hasil pertanian dengan memperhebat penanaman tembakau, jagung dan tanaman-tanaman lain. Gerakan koperasi telah membuka djalan perintisan yang baik, dengan telah banjarknja penanaman-penanaman kopi yang mendjadi anggota koperasi-koperasi pendjualan. Koperasi-koperasi yang sama juga telah dibentuk dikalangan penanam-penanam kapas. Perdagangan kopi dan kapas diawasi oleh Pemerintah.

Terdapat djuga kemajuan yang berarti dalam pembangunan industri. Dengan mengetjualikan beberapa pertambangan dan pabrik pengolahan makanan, tidak ada kehidupan industri didjaman Hindjadjahan.

Kini Uganda memiliki pabrik ban speda, pabrik penggilingan padi di Jinja dan pabrik semen di Toroto. Projek-projek yang hampir selesai termasuk pabrik gula di Teluk Sango yang akan menghasilkan 16.000 ton gula setahunnja dan sebuah pabrik tekstil yang modern. Kebanyakan dari pabrik-pabrik yang baru itu dikuasai oleh badan Pembangunan Uganda. Dalam tiga tahun berdeka, hasil nasional telah naik dengan lebih dari 100 djuta dollar dan sekarang mentjapai angka 544 djuta dollar, demikian menurut angka-angka resmi.

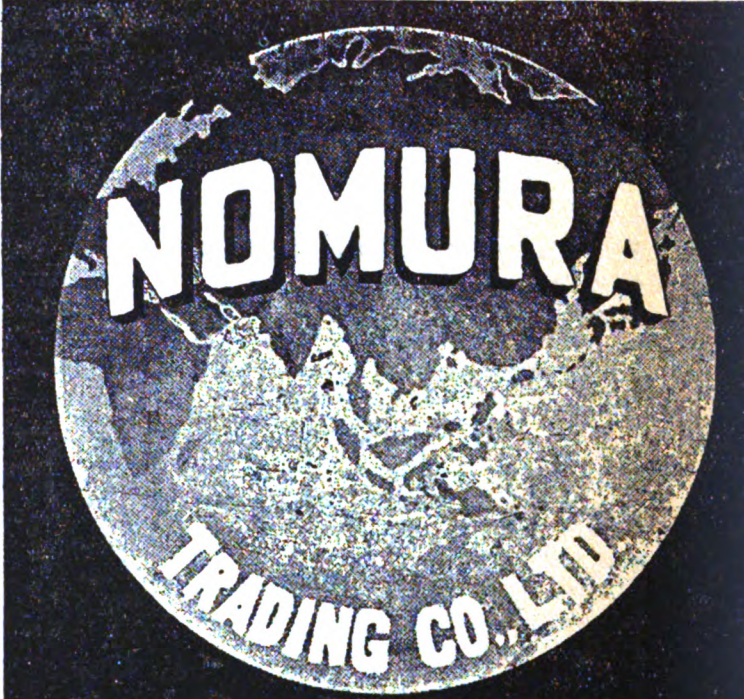
Negara netral dan positif.

Uganda menganut politik netral yang positif dan politik persahabatan dengan semua negara. Ia mengandjurkan perlutjutan sendjata secara umum dan sepenuhnya, pelarangan senjata-senjanta nuklir, tindakan-tindakan untuk menjegah perang dunia ketiga. Uganda djuga telah mengutuk agresi imperialisme Amerika di Vietnam.

Pemerintah Obote telah setjara aktif berkampanye bagi persatuan Afrika dalam perdjjuangan membersihkan kolonialisme dari bumi Afrika. Uganda mendukung perdjjuangan-perdjjuangan

kemerdekaan rakjat-rakjat Angola, Mozambique dan negara-negara djadajahan Portugis lainnya. Negara ini telah menutup konsulat Portugis di Kampala, memboikot barang-barang Afrika Selatan, dan mendesak P.B.B. untuk memberikan sanksi-sanksi terhadap pemerintahan rasialis Afrika Selatan dan Rhodesia.

Antara.



Kantor Pusat : No. 2 Nomura Bldg., 56, Binomachi-ku 2-chome, Higashi-ku, Osaka, Japan
Cable Address : NOMURABLDG OSAKA Tel. (23) 6721, 8571

Tjbang² di Djepang : Tokyo (Nomura Bldg., 2, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Tel. 231-1361) Yokohama, Nagoya & Kobe

Kantor Perwakilan : No. 12A Djalan Asemka, Djakarta - Kota,
Djakarta : Tel. O.K. 21981

Kantor² diluar negeri :
NEW YORK, LOS ANGELES, HOUSTO, SAO PAULO, SANTOS, CORNELIO, SAIGON, LAGOS, BANGKOK, RANGOON, DJAKARTA, SURABAJA, MEDAN, SINGAPORE, MONGKONG, MANILA, NOUMEA, WELLINGTON, SYDNEY, PHNOM-PENH, NAIROBI, MAGRAS, NEW DELHI, PENANG, CALCUTTA, KUALA LUMPUR, HAMBURG, DAN LAIN-LAIN.

GENERAL IMPORTERS & EXPORTERS

N. V. INDONESIAN SERVICE COY.

* IMPORTIR

* ASSEMBLER

* MANUFACTURER

- * DODGE — Trucks
Pick-ups
Passenger cars
- * KAISER JEEP — Jeeps
- * MITSUBISHI — Jeeps
- * IKARUS — Buses
- * CSEPEL — Trucks
- * FIAT — DM leonsino trucks
Compagnola jeeps
- * MISC — Spare parts, technical articles, tools.

Office : 2 Djalan Lodan Djakarta Kota

Phone : O.K. 23235 — 23236 — 23237

Cable : INSEVICE

SOLE DISTRIBUTOR : P.T. INDONESIAN SALES ORGANIZATION
Djalan Djendral Sudirman, Kebajoran
Phone : O. Keb. 71633 — 71634

C.V. KRETEK

Tjabang — DJAKARTA

Pasar Pagi No. 86, (Tingkat Satu)

Telp : O.K. 20554 — 21523

DJAKARTA-KOTA

Alamat kawat : CVKRETEK Djakarta

IMPORTIR — EXPORTIR — INTERINSULAR — HASIL BUMI

"BATIK BENTENG KEPRIBADIAN NASIONAL

MEMAKAI BATIK BERARTI IKUT MELAKSANAKAN "TRISAKTI"

DALAM BIDANG JANG BERKEPRIBADIAN NASIONAL.

KOPERASI PUSAT

G. K. B. I.

(Gabungan Koperasi Batik Indonesia)

Djalan Djendral Sudirman No. 28

Djakarta.

Ketentuan² Pelaksanaan Undang-Undang Lalu Lintas Devisa Tahun 1964, Dibidang Efek²

Dengan menundjuk kepada pasal 1 sub 5 dan 7, pasal 16 dan pasal 17 ayat 2, 4, 5, 6 dan 7 Undang-Undang Devisa tahun 1964 (U.U. No. 32 tahun 1964, L.N. th. 1964 No. 131) serta Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No. 2/Kep/UBS/65 tanggal 8 Djanuari 1965, maka Pimpinan Biro Lalu Lintas Devisa — Menteri UBS/Gubernur Bank Indonesia dengan pengumuman No. 11/Inv./BLLD/65, tgl. 24/8 1965 menetapkan ketentuan² pelaksanaan Undang² Devisa 1964 dibidang efek² sebagai berikut:

I. WADJIB SIMPAN/DAFTAR EFEK².

A. (1). Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia diwajibkan, sepanjang, hal ini belum dilakukannya, untuk menjimpan dalam simpanan terbuka efek² dalam mata uang lain daripada Rupiah seperti termaksud dalam pasal 16 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Devisa 1964:

- a. pada salah satu Bank Devisa Pemerintah di Indonesia, apabila efek² jang bersangkutan berada di Indonesia.
- b. pada salah satu koresponden Bank Devisa Pemerintah diluar negeri dalam sebuah depot atas nama Bank Devisa Pemerintah jang bersangkutan, apabila efek² jang bersangkutan pada saat diperolehnya berada diluar negeri.

(2). Pembebasan² dari wadajib-simpan/daftar atas efek² seperti jang termaksud dalam pasal 16 ayat 1 dari Undang² Devisa 1964, jang pernah diberikan oleh De Javasche Bank/LAAPLN berdasarkan Deviezen Ordonnantie 1940 dan peraturan² pelaksanaannya dianggap tidak berlaku lagi, terketjuali terhadap efek² jang dikeluarkan oleh badan hukum jang didirikan sebelum 27 Desember 1949 jang dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Seperti diumumkan dalam Pengumuman BLLD No. 10/Inv./BLLD/65 tertanggal 26 Djuni 1965 kewadajiban tentang pentjataan dan penjimpanan efek² jang tersebut terachir tidak meliputi:

- a. efek² jang dahulu berdasarkan Deviezenordonnantie 1940, pernah dibebaskan dari kewadajiban penjimpanan oleh De Javasche Bank/LAAPLN;
- b. Efek² jang tidak mempunyai notering pada bursa diluar negeri dan/atau telah dirobah mendjadi efek² dalam Rupiah atau telah dikeluarkan duplikat / tambahan modal dalam Rupiah.

B. (1). Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing, sepanjang hal ini belum dilakukannya, diwadjabkan menjimpan dalam simpanan terbuka milik efek²nja jang berada di Indonesia, jang berbunji:

- a. dalam mata uang Rupiah, ketjuali obligasi² jang dikeluarkan oleh Pemerintah, Badan² Pemerintah, Bank² Pemerintah, Perusahaan² Pemerintah, Bank² Pembangunan Daerah dan Bank Pembangunan Swasta,
- b. dalam mata uang lain daripada Rupiah, sepanjang efek² jang bersangkutan diperoleh dan dimiliki sebelum tanggal 28 Desember 1964 dan efek² jang diperolehnya dengan hak² jang timbul dari efek² jang dimiliki sebelum tanggal 28 Desember 1964, termaksud,

pada salah satu Bank Devisa Pemerintah.

(2). Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing diwadjabkan untuk menjimpan milik efek²nja jang berada di Luar Negeri, jang berbunji: dalam mata uang Rupiah, pada salah satu koresponden Bank Devisa Pemerintah.

C. Bank Devisa Pemerintah seperti jang dimaksud pada sub I A dan I B diwadjabkan untuk melaporkan dalam bentuk daftar nominatif efek² jang dikenakan wadajib simpan/daftar termaksud diatas:

(1). milik Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia

- (2). milik Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing,

jang disimpan padanja atau pada korespondennja diluar negeri kepada Bank Indonesia guna kepentingan Biro Lalu Lintas Devisa menurut tjara² dan petunjuk² jang akan diberikan oleh Bank Indonesia.

- D. Untuk pendaftaran efek² jang dilakukan setelah lampau batas waktu seperti jang ditetapkan dalam pasal 16 ayat 1. U.U. Devisa 1964 kalimat terakhir, jaitu enam bulan sesudah tanggal 28 Desember 1964 atau tiga bulan sesudah efek² diperoleh, harus dimintakan izin dahulu dari Biro Lalu Lintas Devisa dengan perantaraan Bank Devisa Pemerintah disertai penjelasan² mengenai efek jang bersangkutan dan alasan dari kelambatan tersebut. Dengan Pengumuman B.L.L.D. No. 10/Inv/BLLD/65 tanggal 26/6/65 waktu pendaftaran jang tersebut pertama diundurkan sampai 30 September 1965.
- E. Terhadap efek², baik jang berbunji dalam mata uang Rupiah atau lainnja, jang belum dikeluarkan surat² efeknja seperti misalnja efek² atas nama, ketentuan² dalam pasal 16 U.U. Devisa 1964 dianggap telah dipenuhi, apabila petikan dari Daftar Pemegang saham/daftar hutang (Aandelen/Schuld-register) jang ditanda tangani oleh Direksi P.T./Badan Hukum jang bersangkutan disampaikan kepada salah satu Bank Devisa Pemerintah atau korespondennja di Luar Negeri untuk didaftarkan sesuai dengan ketentuan² sub. A, B, C dan D tersebut diatas.

II. EFEK² JANG BERADA DI INDONESIA.

A. Memperoleh dan memindah tangankan efek² (verkrijging en vervreemding).

- (1). Pemindahtanganan / perolehan efek², jang berbunji dalam mata uang lain daripada Rupiah, jang telah disimpan untuk didaftarkan pada Bank² Devisa Pemerintah sesuai dengan ketentuan² dalam pasal 16 U.U. Devisa tahun 1964:

- a. dengan djalan perdagangan di Indonesia dengan pembayaran dalam mata uang Rupiah,
- b. dengan djalan pembagian warisan dan sebagainya,

antara orang² Warga Negara Indonesia/Badan² Hukum Indonesia, antara Warga Negara Indonesia/Badan² Hukum Indonesia disatu pihak dan Warga Negara Asing/Badan Hukum Asing dilain pihak sebagai jang

melepaskan hak miliknya, selaku penjual, pemberi hibah, jang mewariskan dan lain sebagainya, dapat dilakukan dengan bebas dengan ketentuan bahwa efek² jang bersangkutan tetap harus disimpan dan didaftarkan pada salah satu Bank Devisa Pemerintah.

- (2). Warga Negara Asing/Badan Hukum Asing dilarang memperoleh dan memindah tangankan mata uang lain daripada Rupiah, jang telah disimpan untuk didaftarkan pada Bank² Devisa Pemerintah sesuai dengan ketentuan² dalam pasal 16 U.U. Devisa tahun 1964:
- a. dengan djalan perdagangan di Indonesia dengan pembayaran dalam mata uang Rupiah.
 - b. dengan djalan penghibahan.
- (3). Pemindah tanganan efek² jang berbunji dalam mata uang Rupiah, baik jang sudah maupun jang belum/tidak disimpan untuk didaftarkan pada Bank² Devisa Pemerintah sesuai dengan ketentuan² dalam pasal 16 U.U. Devisa tahun 1964, kepada Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan dengan izin Biro.
- (4). Dengan mendasarkan atas usaha mengefektifkan pengerahan "fund and forces" swasta jang progressif baik nasional maupun domestik sebagaimana jang tertantum dalam ketetapan M.P.R.S. No. VI/MPRS/65 tentang Banting Stir untuk berbangunan tertanggal 16 April 1965 maka kepada Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing diberikan izin umum untuk memperoleh, memperdagangkan dan memindahtangankan di Indonesia obligasi dan promes² atau surat hutang umum lainnja jang berunji dalam mata uang Rupiah, jang dikeluarkan oleh Pemerintah, Badan² Pemerintah, Bank Pemerintah, Perusahaan² Pemerintah, Bank² Pembangunan Daerah dan Pembangunan Swasta.
- (5). Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing, jang tidak ditentukan oleh Biro untuk diizinkan sebagai mana jang tertantum dalam pasal 17 ayat 7 dari Undang² Devisa 1964 dilarang untuk mengeluarkan piagam djamam obligasi, saham, tanda piagam

djaman djangka pandjang lainnja dan tanda pindjaman djangka pendek jang berbunji dalam mata uang Rupiah.

Rupiah dilarang, ketjuali dengan izin Biro.

III. EFEK² JANG BERADA DILUAR NEGERI.

A. Efek² dalam mata uang lain daripada Rupiah.

B. Ekspor efek².

(1). Dengan tidak mengurangi ketentuan² mengenai ekspor efek² ke Negeri Belanda seperti termaksud dalam Pengumuman kami No. 2/Inv/BL-LD/65 tanggal 25 Djanuari 1965, kepada Bank² Devisa Pemerintah diberikan izin umum untuk mengekspor dari Indonesia keluar negeri efek² dalam mata uang lain daripada Rupiah, jang disimpan padanja, sesuai dengan ketentuan² dalam pasal 16 U.U. Devisa 1964, untuk didjual, keperluan konversi dan inkaso dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. hasil konversi berupa efek² harus dikirim ke Indonesia dan diselesaikan dan diperlakukan menurut ketentuan² pada sub I diatas.

b. hasil pendjualan/pembayaran kembali efek², hasil kuponbunga, dividen, stock-dividen, bukti claim, berupa uang tunai harus ditransfer ke Indonesia, dari djumlah mana:

70% harus diserahkan kepada Dana Devisa, 30% dapat ditata-usahakan sebagai devisa pelengkap menurut ketentuan² jang berlaku.

Sepandjang mengenai efek² kupon, dividen, stock-dividen, claim jang mengenai tahun buku jang berachirnja tanggal 1 Djuli 1965 atau sesudahnja.

c. hasil kupon dividen, stock-dividen, bukti, claim jang mengenai satu tahun buku jang berachirnja selambat-lambatnja 30 Djuni 1965, untuk seluruh djumlahnja dapat ditata-usahakan sebagai devisa pelengkap menurut ketentuan-ketentuan jang berlaku.

(2). Ekspor efek² dalam mata uang lain daripada Rupiah, jang dikenakan wadjib simpan/daftar seperti jang ditentukan dalam pasal 16 U.U. Devisa tahun 1964 keluar negeri untuk keperluan lain daripada jang disebut sub (1) diatas hanja dapat dilakukan dengan izin khusus dari Biro.

(3). Ekspor efek² dalam mata uang

(1). Terhadap efek² jang berbunji dalam mata uang lain daripada Rupiah, jang dikenakan wadjib-simpan/daftar seperti jang ditentukan dalam pasal 16 U.U. Devisa 1964 Bank² Devisa Pemerintah dapat melakukan pekerdjaan² mendjualkan, menginkasokan, mengkonversikan dan lain sebagainya bagi kepentingan para pemiliknja dengan ketentuan² sebagai berikut:

a. Hasil konversi berupa efek² harus disimpan/dilaporkan menurut ketentuan² sub I diatas.

b. Hasil pendjualan / pembayaran kembali efek², hasil kupon-bunga dividen, stock-dividen, bukti claim berupa uang tunai harus ditransfer ke Indonesia dari djumlah mana:

70% harus diserahkan kepada Dana Devisa, 30% dapat ditata-usahakan sebagai devisa pelengkap menurut ketentuan² jang berlaku,

sepandjang mengenai efek² kupon, dividen, stock-dividen, claim jang mengenai tahun buku jang berachir tanggal 1 Djuli 1965 atau sesudahnja.

c. hasil kupon, dividen, stock-dividen, bukti claim jang mengenai satu tahun buku jang berachirnja selambat-lambatnja 30 Djuni 1965 untuk seluruh djumlahnja dapat ditata-usahakan sebagai devisa pelengkap menurut ketentuan² jang berlaku.

(2). Pendjualan dan inkaso efek², kupon, dividen, stock-dividen, bukti claim jang hasil²nja digunakan untuk keperluan lain daripada jang disebut sub (1) diatas hanja dapat dilakukan dengan izin khusus dari Biro.

(3). Saldo rekening W/K di Negeri Belanda jang berasal dari pengkreditan hasil efek²/pembayaran kembali modal/pendjualan efek²:

a. menurut keadaan s/d 30 Djuni 1965 dapat ditata-usahakan sebagai devisa pelengkap menurut ketentuan² jang berlaku.

b. menurut keadaan per 1 Djuli 1965 dan seterusnya harus di-

transfer ke Indonesia, dari jumlah mana:

70% harus diserahkan kepada Devisa.

30% dapat ditata-usahakan sebagai devisa pelengkap menurut ketentuan yang berlaku.

B. Efek² dalam mata uang Rupiah.

Efek² dalam mata uang Rupiah milik Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing, yang berada diluar negeri, hanya dapat diperjual belikan/dipindah-tangankan kepada Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing dengan izin Biro, ketjuali untuk memperjual belikan 3% Obligasi Bank Industri Negara per 1969/70/71 (Pindjaman Rurni).

C. Impor efek² dan Pembelian efek² diluar negeri oleh Warga Negara Indonesia dan Hukum Indonesia.

(1). Pemasukan efek² ke Indonesia termasuk kupon² dan bukti² dividen, hanya dapat dilakukan dengan perantaraan Bank² Devisa Pemerintah dengan ketentuan² sebagai berikut:

a. Dalam hal inkaso efek² dalam Rupiah, yang bukan 3% Obligasi Bank Industri Negara per 1969, 1970 dan 1971 (Pindjaman Rurni), dan hasilnya berupa uang tunai maka uang untuk transfer hasil tersebut keluar negeri tidak disediakan devisa dari Dana Devisa. Transfer keluar negeri dengan devisa dari sumber lain hanya dapat dilakukan dengan izin Biro.

Penggunaan uang tunai hasil inkaso efek² tersebut di Indonesia dapat dilakukan setjara bebas.

b. Dalam hal hasil konversi dari efek² yang berbunji dalam Rupiah milik Warga Negara Asing/Badan Hukum Asing berupa efek², maka efek² tersebut harus disimpan pada Bank Devisa Pemerintah di Indonesia.

c. Untuk pembelian efek², yang berbunji dalam Rupiah dan yang berada diluar negeri, oleh Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia dengan pembayaran dalam mata uang Rupiah tidak diperlukan izin Biro, dengan ketentuan, bahwa efek² yang bersangkutan wadajib dikirimkan ke Indonesia dengan perantaraan Bank Devisa Pemerintah untuk dipelakukan sesuai dengan ketentuan²

dalam pasal 16 Undang-Undan Devisa tahun 1964.

d. Pembelian efek² yang berbunji dalam mata uang Rupiah dan berada diluar negeri, oleh Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia dengan pembayaran dalam mata uang lain daripada Rupiah hanya dapat dipelakukan dengan izin Biro.

IV. PEMEBEBASAN DAN PENJERAHAN EFEK

Permintaan dari Warga Negara Asing/Badan Hukum Asing untuk membebaskan, menjerahkan dan mengekspor efek²nja yang berbunji dalam mata uang lain daripada Rupiah, hanya dapat dipertimbangkan oleh Biro Lalu Lintas Devisa, apabila pemiliknja tersebut membuat selama-lamanja akan meninggalkan Indonesia atau telah menghentikan aktivitasnja di Indonesia.

V. KETENTUAN² PELENGKAP.

Ketentuan² dalam pengumuman ini tidak mengurangi larangan² yang sudah atau akan dikeluarkan oleh Instansi² yang berwenang mengenai djual-beli saham perusahaan Asing yang diambil alih atau dikuasai oleh pemerintah. Bank² Devisa Pemerintah diwadjabkan untuk memperhatikan larangan² termaksud dengan sebaik-baiknya.

VI. RETRIBUSI.

Sambil menunggu penetapan retribusi Biro Lalu Lintas Devisa dengan memperhatikan petundjuk² Dewan Lalu Lintas Devisa, maka untuk sementara ditetapkan, bahwa pemberi izin² seperti yang disebut dalam peraturan ini dikenakan retribusi menurut ketentuan² sebagai berikut:

A. Izin untuk pembelian/pendjualan/pemindahtanganan efek²:

(1). Untuk efek² yang berbunji dalam mata uang Rupiah $\frac{1}{4}\%$ (seperempat perseratus) dari harga pembelian/pendjualan atau harga taksasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(2). Untuk efek² dalam valuta asing $\frac{1}{4}\%$ (seperempat perseratus) dari nilai lawannja dalam Rupiah atas dasar harga pendjualan/pembelian atau harga taksasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

B. Untuk izin yang dikeluarkan berdasarkan harga yang tersebut diatas sub IV 2% dari harga nominal atau djika tidak ada harga nominal, harga notering yang diketahui terakhir oleh Bank Indonesia, atau (kalau tidak ada) \$ 10,— per efek.

Retribusi ini dipungut dalam valuta asing

C.V. „NAROTAMA”

EXPORTERS, IMPORTERS & GENERAL AGENTS

DJALAN TOKO TIGA 55

TELEPON 21686

DJAKARTA KOTA

Cables : NAROTAMA DJAKARTA

EXPORT :

- * **COPRA**
- * **RUBBER**
- * **PEPPER**
- * **COFFEE**
- * **LUMBER**
- * **NUTMEGS**

IMPORT :

- * **ALL KINDS OF COMMODITIES**

PERATURAN RETRIBUSI B.I.L.D. UNTUK DEvisa PELENGKAP

Berdasarkan pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Devisa 1964 Dewan Lalu Lintas Devisa dalam rapatnja tanggal 7 Djuli 1965 Biro Lalu Lintas Devisa, maka dengan Pengumuman No. 5/DP/BLLD, tgl. 28 Agustus 1965 telah menetapkan Peraturan Retribusi Biro Lalu Lintas Devisa untuk Devisa Pelengkap sebagai berikut:

Pasal 1.

Retribusi untuk izin berusaha sebagai pedagang valuta asing termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1965 pasal 6 berdjumlah Rp. 100.000,— (Seratus ribu Rupiah) sedang untuk tiap perpanjangn izin termaksud berdjumlah Rp. 50.000,— (Lima puluh ribu rupiah).

Pasal 2.

- 1) Terhadap transaksi pemindah-tanganan devisa pelengkap sipendjual diharuskan membajar retribusi untuk kepentingan Biro sebesar 1 (satu) promille dari djumlah valuta asing jang dipindah-bukukan.
- 2) Retribusi dipungut oleh pedagang valuta asing jang wadjib menjerahkannya kepada Bank Negara Indonesia untuk kepentingan Biro.

Pasal 3.

Terhadap impor barang dengan L/C dikenakan retribusi untuk kepentingan Biro sebesar 5 (lima)

persen dari Nilai Transaksi Rupiah dari valuta asing tersebut dalam L/C. Retribusi ini dipungut sekaligus oleh bank devisa pada waktu pembukaan L/C.

Pasal 4.

Terhadap segala djenis transfer jang disalurkan melalui Bank devisa jang tidak mengenai pengimporan barang dikenakan retribusi untuk kepentingan Biro sebesar 5 (lima) persen dari Nilai Transaksi Rupiah dari djumlah valuta asing jang ditransfer keluar negeri. Retribusi ini dipungut oleh bank devisa pada waktu penjelenggaraan transfer.

Pasal 5.

Pembayaran retribusi termaksud dalam pasal 1 dan 4 dilakukan:

- a. dengan wesel pos
- b. dibajar pada kas Biro
- c. dengan penjetoran pada Bank Negara Indonesia atas rekening giro Biro.

Pasal 6.

Ketentuan jang bersangkutan dalam Pengumuman Biro Lalu Lintas Devisa No. 1/DP/BLLD tanggal 20 Pebruari 1965 jaitu Bab III pasal 1 dan Bab VI pasal 1 ditarik kembali.

TJEK-TJEK JANG HILANG

Berhubung pada waktu achir² ini sering terdjadi adanja iklan² di surat-surat kabar tentang tjek-tjek jang hilang/jang dinjatakan tidak berlaku lagi maka untuk mentjegah digunakannya tjara² tersebut oleh oknum² untuk maksud² tertentu dengan ini dipandang perlu memberikan pendjelasan kepada chalajak ramai sebagai berikut:

1. Tanpa menghiraukan alasan apapun jang dipakai, maka menurut ketentuan² jang berlaku tjek baru dapat dinjatakan tidak berlaku setelah djangka waktu 70 (tudjuh puluh) hari, terhitung mulai tanggal penarikan tjek tersebut.
2. Dalam hal tjek jang untuk maksud² tertentu tidak bertanggung atau diberi tanggal mundur (post dated), maka penarik diwadjibkan menjediakan dana setjukupnja semendjuk saat penarikan tjek sampai saat tjek tersebut dimintakan pembajarannja di Bank jang bersangkutan.
3. Apabila ada tjek benar² hilang, maka penarik tetap berkewadjan menjediakan dalam rekeningnja dana jang tjukup (sedjumlah jang tertjantum dalam tjek jang hilang tersebut) selama djangka waktu tersebut pada angka 1 diatas.

4. Adanja iklan² tentang tjek hilang (tjek dinjatakan tidak berlaku lagi) tidak perlu dinjatakan oleh bank sepanjang nasabah jang bersangkutan tidak melaporkan setjara tertulis kepada bank jang bersangkutan disertai keterangan dari Kepolisian setempat bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan kepada bank danja.
5. Apabila tjek jang dinjatakan hilang dan jang penariknja telah menempuh prosedur tersebut pada angka 3 diatas, diajukan kepada bank untuk dimintakan pembajarannja, maka bank pertama² akan meneliti apakah tjek tersebut ada dananja atau tidak.
6. Bilamana dananja ada (tjukup), maka bank akan segera menghubungi penarik tjek a. kepolisan jang telah menerima laporan tjek hilang tersebut guna mengusut/menjelesaikan tjek tersebut sebagaimana mestinja.
7. Bilamana ternjata dananja tidak ada (tidak tjukup), maka tjek itu akan ditahan oleh bank sebagai tjek kosong menurut ketentuan pelaksanaan U.U. No. 17 tahun 1964.

Demikian pengumuman Menteri Urusan Pertambangan dan Modal Swasta untuk dimintakan chalajak ramai pada umumnja pihak² jang bersangkutan pada chususnja.



Perusahaan
NIAGA NEGARA

P. N. PEMBANGUNAN NIAGA I

Kantor Pusat: Hajam Wuruk No. 127 Djakarta

Telepon No. O.K: 21401 - 02 - 03

Melaksanakan Triprogram Pemerintah, dalam bidang perdagangan teknik.

1. Impor/Distributor :

Bahan baku; bahan bangunan; Obat²an pharmasi; bahan² kimia tehnik; mesin² kimia tehnik; mesin² perkebunan/pertanian; mesin² industri ringan/berat; mesin² logam/kaju; grafika; alat² besar & Road rollers; mesin² diesel & tenaga penggerak utama arus lemah; arus kuat; mesin² sandang (pemintalan, peradjukan, pertenenan, Finishing & printing).

2. Export/interinsulair :

Karet, kopra, hasil² bumi dan barang²tehnik.

3. Pembangunan projek² :

Perentjana & pelaksana; melengkapi; reparasi & revisi, Projek² umum dan industri.

Jabang² Utama : Djakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan.

Jabang² biasa : Palembang, Padang, Banda Atjeh, Makasar dan Manado.

ub. Tjabang : Tjirebon

erwakilan di luar Negeri: Tokyo, Amsterdam dan Manila.



P.N. "PANTJA NIAGA"

FORMERLY P.N. "TRI BHAKTI"

(STATE ENTERPRISE)

HEAD OFFICE

ADDRESS : 94 — 96 KRAMAT RAYA
DJAKARTA IV — 5, INDONESIA

CABLE ADDRESS : CENTRAL

PHONE NOS : 47853 — 46070 — 46071 — 46072 — 46073 — 46074
46075 — 46076 — 46077 — 46078 — 46079 — 49891

TELEX NOS : 011 — 291,001 — 208

P.O. BOX : 205

CODE USED : ACME

BANKER

BANK NEGARA INDONESIA UNIT I
BANK NEGARA INDONESIA UNIT II
BANK NEGARA INDONESIA UNIT III

EXPORT :

- * RUBBER — COPRA — COPRA CHIPS — CAKES
- * PEPPER — COFFEE — NUTMEGS — CASSIA VERA
- * MANIOK MEALS — TELLOW SEEDS — RATTAN — ETC.

IMPORT :

- * TEXTILES — DYE STUFFS — RAW COTTON — — STAPLE FIBRE
- * PAPER — STATIONERY — WHEAT FLOUR
- * FERTILIZERS & OTHER CHEMICAL — IRON & STEEL PRODUCTS
- * BUILDING MATERIALS — MACHINERIES — TOOLS & SPAREPARTS

BRANCHES IN INDONESIA

BANDA ATJEH — MEDAN — PADANG — PALEM-
BANG — DJAKARTA — TJIREBON — SEMARANG
— JOGJAKARTA — SURABAJA — BANDJARMASIN
— PONTIANAK — MANADO — GORONTALO — MA-
KASAR!

Unit Khusus "KARYA TJOTAS" Djakarta I

WARTA



Perdagangan

RECEIVED

NOV 11 1966

UNIV. WISCONSIN LIBRARY

AP
W299
P433
18
12



12

TAHUN KE - XVIII

1965

MADJALAH „WARTA PERDAGANGAN”

Terbit tiap 2 Minggu sekali

Diterbitkan oleh :

Departemen Perdagangan Dalam Negeri beserta Urusan Perdagangan Luar Negeri dari Kompartimen Luar Negeri/H.E.L.N. dan Perdagangan Luar Negeri.

Pelindung :

J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/
Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri
BRIG. DJENDERAL A. JUSUF

Pemimpin Umum :

Kepala Direktorat Marketing dan Research
Ir. J.J. Pitoy M.A.

Staf Redaksi :

Staf Direktorat Marketing dan Research.

Penanggung Jawab :

Kepala Seksi Publikasi Madjalah
Anwar B. Harahap.

Pembantu Khusus :

Kolonel Usman Ismail — Alamsjah S.B.P. —
R.H. Tuwaidan M.A. — Drs Sjaaf Muchtar —
Major Drs Sukadjat — R. Isa — Budhiman
B.A. — Drs A. Aidit — Suprpto — Sudjadi
— A. Karim Usman S.H.

Alamat Redaksi dan Tata Usaha :

Madjalah "WARTA PERDAGANGAN"
Direktorat Marketing dan Research
Djl. Tanah Abang Timur No. 87,
D J A K A R T A.

Pelaksana/Pertjetakan :

Kepala Pertjetakan P.N. Karya Tjotas
Burdi Reksodirdjo.

Pembayaran uang langganan dilakukan dimuka dengan :

1. Penjetoran atas Rekening Madjalah Warta Perdagangan Kode No. KB/WA/-194, pada Bank Negara Indonesia Unit I Djl. Thanrin, Djakarta.
2. Dinas Giro dan Tjek Pos atau dengan pos wesel jang langsung dialamatkan kepada Tata Usaha Warta Perdagangan Direktorat Marketing dan Research.

Daftar Isi

Halaman

1. Tujuan Revolusi kita ialah menjelenggarakan sosialisme Pantjasila
2. Peras otak sekuat-kuatnja untuk melaksanakan berdikari dibidang sandang
3. Laporan Pers ibukota mengenai kundjungan J.M. Menteri Perdagangan Brig. Djen. A. Jusuf ke Lampung
4. Bahan baku untuk produksi sandang kearah Berdikari dalam bidang Sandang
5. Produsen Eksportir
6. Pendirian Perusahaan² Negara jang baru dibidang Perdagangan
7. Adjaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno "Dubbele les"
8. Memperkenalkan : Republik Guinea
9. Pengumuman/Variaberita Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri
10. Pembagian Tugas Gubernur² Pengganti B.N.I.
11. Tugas dan personalia Perwakilan BLLD di Luar Negeri
12. Undang-undang Devisa 1964 (undang² no. 32 th. 1964)
13. Penetapan harga penjerahan Barang² Ekspor Golongan II

Keterangan gambar kulit muka :

Demi pelaksanaan prinsip Berdikari, meski dengan alat jang sederhana Karyawan wanita ini dengan tekun menjortir lada mendjaja mutu ekspor.

IZIN TERBIT :

Keputusan Menpen No. 00231/R/SK DPH SIT/'65 tgl. 3-9-1965, dan

Keputusan Peperda Djakarta Raya dan Sekitarnya No. Kep. 037/P/X/65, No. Urt. 5 tgl. 21-10-1965

TUDJUAN REVOLUSI KITA IALAH MENJELENGGARAKAN SUATU SOSIALISME PANTJASILA

Presiden/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dalam amanatnya didepan para anggota Badan Sardjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Istana Negara Djumat siang tanggal 17 September 1955 menegaskan, bahwa tudjuan revolusi kita adalah menjelenggarakan suatu Sosialisme Indonesia, bukannya Sosialisme Uni Sovjet, Sosialisme Tiongkok, Korea, Tjekoslowakia, Bulgaria dan sebagainya, melainkan *SOSIALISME PANTJASILA*. Untuk menjelenggarakan itu tidak bisa kita gunakan teori² dari ahli² ekonomi dari negara² sosialis lainnja, apalagi ahli² ekonomi dari negara² kapitalis. Oleh karena itu Presiden mengandjurkan agar para sardjana ekonomi Indonesia khususnya, bangsa Indonesia umumnya, tidak sadja meletakkan buku² Engelbrecht, John Maynard Keynes dan sebagainya, melainkan membuangnja djauh² dalam laut, dan sebaliknya mentjiptakan pikiran² baru dalam bidang ekonomi sosialis Indonesia.

Ditandaskannja, bahwa penjelenggaraan ekonomi dalam alam sosialisme Indonesia bukan hanya monopoli daripada sardjana Ekonomi Indonesia saja sebagaimana halnya riset bukan hanya meletakkan monopoli para sardjana. Dan penjelenggaraan ekonomi tersebut, jang tidak bisa lepas dari bidang² politik, kulturil dllnja, dewasa ini masih merupakan problem bagi kita.

Tidak boleh lain diluar ketentuan MPRS.

Pada awal amanatnya Presiden Sukarno menjelaskan, bahwa setiap berhadapan dengan para sardjana tiada lain daripada memintakan bantuan dan reka untuk turut menjumbangkan pemikiran reka dalam melaksanakan atau merealisasikan keputusan² MPRS.

Dikatakannja, bahwa oleh MPRS jang merupakan Dewan Tertinggi di Indonesia, kepada kita telah ditundjukkan apa² jang harus kita selenggarakan. Oleh karena itu Presiden sebagai Mandat MPRS tidak boleh menjelenggarakan hal² selain jang telah ditentukan oleh Lembaga para tsb.

"Saja tidak boleh se-mau² saja, dan saja harus melaksanakan apa jang telah menjadi keputusan MPRS, dan ini saja transfer kepada saudara²", demikian Presiden jang menambahkannja, bahwa apa jang harus kita selenggarakan adalah Manipol, Dekon, Revolusi Indonesia dan segala tudjuannya

Ditegaskannja, bahwa para sardjana Ekonomi Indonesia tidak boleh menjelenggarakan sesuatu jang diluar keputusan MPRS tsb., dan untuk melaksanakannja mereka harus mempunyai pikiran baru, tidak hanja "ngganduli" atau "nggenuki" textbook² terkenal dari Uni Sovjet, RRT, Korea dan lain sebagainya, apalagi textbook dari para ahli ekonomi kapitalis, lebih² textbook tentang liberal ekonomi.

Tak bisa dengan teori Sumitro.

Ditandaskannja, bahwa Sosialisme Indonesia adalah bukan sosialisme ala Uni Sovjet, RRT, Korea, Tjekoslowakia dan Bulgaria, oleh karena itu tidak akan bisa di "tackle" dengan textbook dari negara² lain.

Selanjutnja Presiden Sukarno menandakan, bahwa Sosialisme Indonesia adalah *SOSIALISME PANTJASILA*, dan bagaimana tjara melaksanakannja, itu jang menjadi problem kita sekarang. Dikatakannja, bahwa karena kita telah terikat pada tugas jang telah terletak diatas pundak kita, maka kita harus berpikir setjara konsepsional.

Djuga kemudian ditandaskan oleh Presiden, bahwa sosialisme Indonesia tidak bisa ditjapai dengan teori²nja Sumitro, jang hanja sekedar ekonomi didikan negeri Belanda. Dinjatakannja, bahwa Sumitro bukannya seorang patriot Indonesia dan tidak mengerti samasekali penjelenggaraan Sosialisme Indonesia. Ia tidak mengerti akan Political Economic Indonesia, oleh karena itu ia djadi gembong PRRI/Permesta, dan kini bahkan ikut "Malaysia", demikian Presiden jang akhirnya mengandjurkan agar para sardjana ekonomi membuang djauh² textbook dari ahli² ekonomi luar negeri, terutama textbook dari ahli² ekonomi kapitalis, lebih² tentang liberal ekonomi. (ANTARA)

**PERAS OTAK SEKUAT-KUATNJA UNTUK MELAKSANAKAN
BERDIKARI DIBIDANG SANDANG**

Presiden Sukarno menginstruksikan kepada seluruh rakyat Indonesia pada umumnya dan para peserta musjawarah besar sandang pertama khususnya, agar bekerdja sehebat-hebatnja dan memeras otak sekuat-kuatnja untuk melaksanakan berdikari dilapangan sandang, jang kini mendjadi pembahasan pokok Mubes Sandang Pertama jang sedang diselenggarakan di Djakarta.

Dalam amanatnja pada pembukaan Mubes Sandang Pertama itu, jang dilangsungkan Kamis malam tanggal 16 September 1965 di Istana Bung Karno, lebih landjut Kepala Negara memperingatkan, bahwa rakyat Indonesia sedjak dulu, jaitu sebelum kaum imperialis membandjiri tanah air kita dengan barang-barang impor, kita rakyat Indonesia sebenarnya adalah satu bangsa jang sudah selfsupporting dibidang sandang.

Oleh karena Mubesan Pertama ini bertudjuan untuk melaksanakan berdikari dilapangan sandang, maka Presiden dalam permulaan amanatnja itu telah memberikan restunja terhadap musjawarah besar sandang pertama ini dan sekaligus mengharapakan, agar Mubesan pertama ini mentjapai sukses sebesar-besarnja.

Gelorakan penjelidikan.

Kepada seluruh rakyat Indonesia dari segala lapisan, Kepala Negara mengandjurkan untuk mengadakan penjelidikan atau "riset" dalam segala bidang untuk mengudjudkan prinsip berdikari dalam segala lapangan penghidupan dan kehidupan kita.

"Djika kita sudah berdikari dalam segala bidang, maka barulah itu namanja kita sudah betul-betul merdeka dan berdaulat sepenuhnya, karena kita bersembojan, bahwa mahkota kemerdekaan itu adalah kesanggupan kita berdiri diatas kaki sendiri dalam segala lapangan", kata Bung Karno.

Presiden sangat menghargai sembojan-sembojan jang antara lain mengatakan "riset bukanlah monopoli kaum sardjana sadja". Dikatakan oleh Bung Karno, bahwa sembojan tersebut sangat tepat, karena masalah riset tersebut harus digelorakan oleh seluruh kalangan rakyat, ja wanita ja pria.

Bangsa jang gegap-gempita.

Tjita-tjita sosialisme bukan baru-baru ini sa kita kenal, tetapi sedjak dulu kita sudah mentjitakan sosialisme. Hanja perkataan "sosialisme" nja jang baru kita kenal, tetapi tjita-tjitanja sedjaman dulukala sudah kita idam-idamkan, sep kata-kata luhur jang sering sekali dikumandangkan oleh Ki Dalang, jaitu masjarakat jang dan makmur, gemah ripah loh djinawi, tata trem kartarahardja dan lain sebagainya.

Sosialisme tidak dapat djatuh dari langit perti embun diwaktu malam, tetapi harus dipdjuangkan sehebat-hebatnja. Ini harus kita sa benar-benar, apalagi jang langsung menjang masalah sandang dan pangan, jang setjara langsung menjangkut penghidupan rakyat didesa-desa dilereng-lereng gunung.

Sedjak tahun 1959 masalah sandang-pangan lah mendjadi salah satu program pemerintah j pokok. Untuk melaksanakan bidang sandangan itu seluruh potensi rakyat harus beker Kita harus betul-betul melaksanakannja den kekuatan seluruh lapisan masjarakat.

Kita adalah satu bangsa jang gegap-gempita satu bangsa jang gemblengan, dan oleh ka itu kita pasti sukses melaksanakan prinsip berdikari dalam segala lapangan.

Setudjui tanam kapas.

Presiden sangat menjetudjui harapan Menteri Pardede, agar seluruh rakyat menanam kapas untuk bahan baku sandang. Tanamlah kapas mana sadja kapas itu dapat tumbuh.

Waktu dulu, ketika kita selfsupporting dibidang sandang, setiap halaman rumah kita terdapat orang jang menanam kapas. Dari kapas-kapas itu rakyat membikin sandangnja sendiri.

Kita sudah tentu tidak bermaksud untuk niru-niru perbuatan Gandhi, jaitu memintal kapas sendiri dengan tangan seperti djaman dahulu. Jang kita inginkan ialah mengerdjakan kapas itu dengan pabrik-pabrik modern, ka sosialisme jang kita sedang bangun sekarang ialah sosialisme modern, jang sesuai dengan tuntutan zaman.

"Tjita-tjita sosialisme kita adalah sosialisme modern, jang dilaksanakan bersama-sama dan dengan mendjalankan distribusi jang seadil-adilnja" kata Bung Karno.

djebol dan bangun.

Mana ada rakjat didunia ini jang senantiasa berijtjara tentang revolusi selain daripada rakjat Indonesia. Perkataan revolusi seolah-olah telah menjadi darahdaging kita.

Ditegaskan untuk kesekian kalinya oleh Kepala Negara, bahwa revolusi adalah suatu proses jang gap-gempita dari pendjebolan dan penanaman. Kita sekarang ini sedang dalam proses jang dekat-itu, djebol, tanam, djebol, tanam.

Kita djebol segala rintangan jang menjebakkan kita tidak berdikari dan kita tanam semua potensi untuk mengudjudkan prinsip berdikari dalam segala bidang.

"Bila saudara-saudara telah mendjalankan proses djebol dan menanam itu, maka berarti saudara-saudara telah melaksanakan revolusi", kata Presiden.

Kita bukan bangsa tempe, kita bukan bangsa matjam karung basah, tetapi kita adalah bangsa jang berani melihat bintang-bintang dilangit dan sanggup mentjapai bintang-bintang dilangit itu.

Ditandaskan oleh Bung Karno, bahwa bukan hanya berdikari dalam bidang politik, ekonomi dan kebudajaan sadja jang kita tjita-tjitakan, tetapi berdikari dalam segala bidang. Bila sudah berdikari dalam segala bidang, itu namanja baru merdeka dan berdaulat sepenuhnya.

Presiden mengutjapkan sjukur, bahwa komando Berikari jang telah dikumandangkannja telah benar-benar dimengerti oleh seluruh rakjat, sehingga sekarang ini seluruh rakjat sudah kerandjangan berdikari.

"Kerandjangan berdikari berarti pula kerandjangan kemerdekaan dan kedaulatan penuh", kata Kepala Negara.

Dalam bagian achir amanatnja, Presiden Sukarno mensitir tulisan didalam sebuah Ensiklopedi buatan Belanda sendiri, jang menjatakan, bahwa sebelum abad ke-19 rakjat Indonesia samasekali selfsupporting dilapangan sandang, malahan mengadakan ekspor sandang. Baru setelah imperialis membandjiri Indonesia dengan hasil-hasil produksinja, rakjat Indonesia itu tergantung dari dunia luar dalam bidang sandang.

Demikian antara lain amanat Presiden Sukarno pada pembukaan Musjawarah Besar Sandang I, jang dilangsungkan di Istana Olahraga Gelora Bung Karno. — (Antara).



Presiden didampingi Brigjen. Ashari (Menteri Perindustrian Textil), T.D. Pardede (Menteri Urusan Berdikari) dan Kol. Abd. Rachman, sedang memperhatikan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) pada pameran Sandang dalam rangka mensukseskan Mubesan-I. (Foto : Bapuskopda).

LAPORAN PERS Ibukota Mengenai Kundjungan J. M. Menteri BRIGDJEN

A. JUSUF ke LAMPUNG, 21 dan 22 September 1965

LAMPUNG

PILOT PROJEK I

KOTARI

Pada tanggal **21 September 1965**, djam 13.00 Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri BRIGDJEN A. JUSUF djuga dalam djabatn beliau selaku Kepala Staf Komando Operasi Berdikari (KOTARI) dan Ibu beserta rombongan berangkat dari lapanganterbang KEMAJORAN (Djakarta) menudju ke Daerah Tingkat I LAMPUNG, dan tiba dilapanganterbang BRANTI (Lampung) pada djam 14.00.

Pendjemputan di lapanganterbang Branti dilakukan oleh Gubernur KDH Lampung, KUSNO DANUPOJO, Pantjatunggal, Perwakilan Departemen Perdagangan, Perwakilan P.N.N., Perwakilan G.P.E.I.S. serta para pembesar dan usahawan setempat.

Upatjara pengalungan bunga diadakan dilapanganterbang dan kemudian rombongan menudju ke Tandjungkarang, tempat penginapan rombongan.

Atjara Menteri di Daerah Tingkat I Lampung itu adalah :

Djam 14.30 makansiang di Mess Projek Besi Badja.

Djam 17.00 briefing dengan instansi² dalam lingkungan Departemen Perdagangan, Perwakilan P.N.N., Perwakilan G.P.E.I.S. beserta Perwakilan BLLD.

Djam 20.00 resepsi perkenalan di Wisma Ria Tandjungkarang, serta dalam kesempatan mana Menteri Brigdjjen Jusuf selaku Kepala Staf KOTARI berkenan memberikan penerangan dan pendjelasan Komando Operasi Berdikari (KOTARI). Atjara pada malam tersebut disusul dengan malam kesenian.

Pada tanggal **22 September 1965**, djam 08.30, Menteri beserta rombongan mengadakan peninjauan ke pabrik² pengolahan lada dan kopi di **Tandjungkarang** dan **Telukbetung** : P.N. DWIKORA, Bakrie & Bros., P.T. Nilakandi Ltd., P.T. Elyana dan C.V. Kretek.

Djam 10.00 Menteri beserta rombongan selanjutnya mengadakan peninjauan ke pelabuhan **Pandjang**. Dalam rangka perajaan Hari Baha Menteri beserta rombongan menudju ke kapal ALRI „R.I. KAKIALI” jang berada diteng laut dan mengadakan upatjara penaburan buny

Djam 12.45 : Rapat di Gedung DPRD- (Daerah Tingkat I LAMPUNG dengan atjara Tjeramah Menteri tentang perdagangan lada dan penegasan² mengenai KOTARI. Nampak ha a.l. Pantjatunggal, Instansi² dalam lingkungan Departemen Perdagangan, Pembesar² serta usahawan setempat (Daerah Tingkat I LAMPUNG).

Djam 14.30 rapat ditutup dan Menteri beserta rombongan menudju lapangan terbang BRANTI dan djam 16.45 pesawat terbang meninggalkan lapanganterbang BRANTI menudju Djakarta.

Dalam rombongan Menteri BRIGDJEN A. JUSUF diikutsertakan selain pedjabat² dari Departemen Perdagangan djuga wartawan² dari surat kabar Harian (Ibukota), L.K.B.N. ANTARA, RRI. — TVRI. PFN. dan Departemen Penerangan R.I.

Dari hasil kundjungan tersebut bersama kami kutipkan laporan dari beberapa wartawan Ibukota jang dimuat dalam surat kabar/buletin masing².

BERITA YUDHA

DAERAH ADALAH BASIS UTAMA EKONOMI NASIONAL KITA

LAMPUNG PROJEK PERTAMA KOTARI

Demikianlah judul dari Surat kabar BERITA YUDHA tgl. 23 - 9 - '65 jang kemudian menu

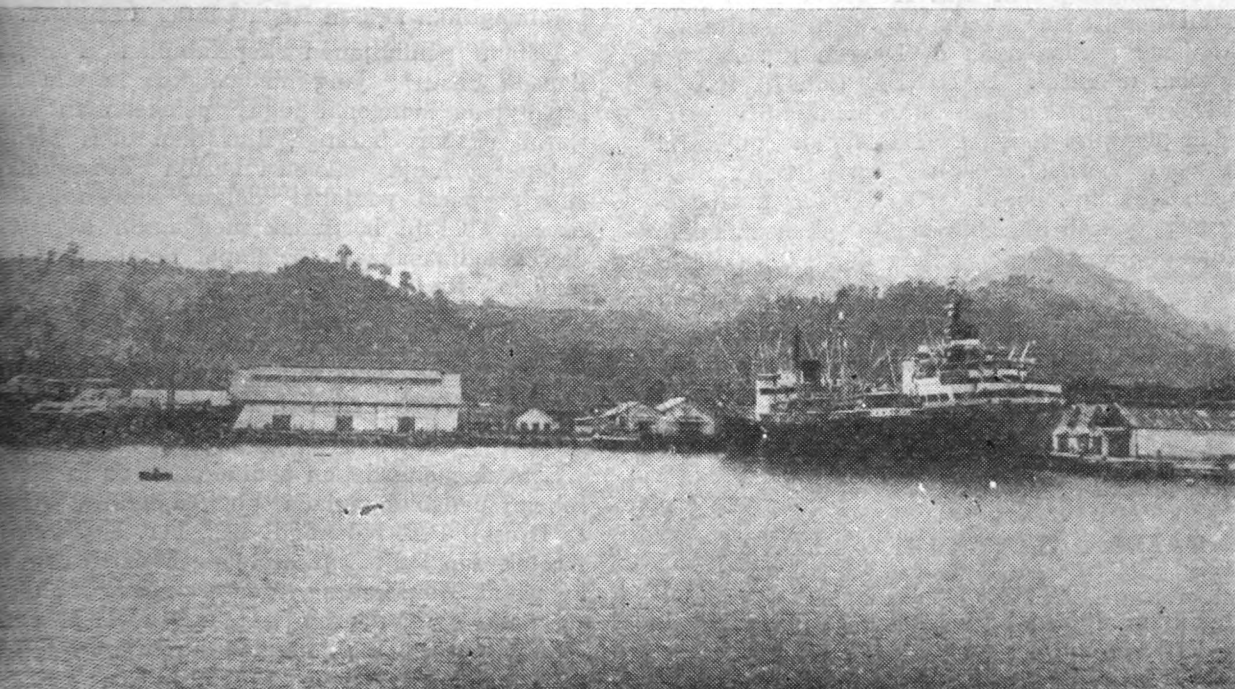
Dengan memperbesar dajatipta dan dajak daerah², maka daerah² akan sungguh² berdiri atas kaki sendiri, sehingga nantinja bisa membangun dengan kekuatan sendiri. Keterangan tersebut diberikan oleh Kas KOTARI selanjutnya mengundjungi Dati I Lampung selama kurang lebih 2 hari.



Menteri Perdagangan Brigdjen A. Jusuf selaku Kas KOTARI, menegaskan bahwa dengan memperbesar daja dan daja kerdja, daerah sungguh² dapat berdikari dan dapat membangun dengan kekuatan sendiri. Hal tersebut sekaligus dapat kita yakini, setelah memperhatikan tumpukan kopi dalam salah satu gudang perusahaan di K Betung (Lampung), yang sedang dikunjungi oleh beliau dan rombongan pada tgl. 21/22-9-1965 j.l.

Foto : Deppen.

Pelabuhan Pandjang yang merupakan pintu gerbang daerah Lampung. Foto : Deppen.



Dalam rangka memberikan pengertian Doktrin Berdikari dan menjadikan bahwasanja daerahlah jang merupakan basis utama ekonomi nasional kita, Kas KOTARI Brig. Djen A. Jusuf telah mengunjungi beberapa pabrik lada, Kopi dan Djagung di kota² Tandjungkarang, Telukbetung dan djuga mengadakan inspeksi ke Pelabuhan Pandjang. Selanjutnja menjatakan kesianja Kas KOTARI memperkuat pendapatnja itu dengan menandakan karena daerah mempunjai man power dan natural resources jang besar. Dengan kekuatannya sendiri daerah akan setjara langsung pasti menambah national income (pendapatan nasional), berkata Kas KOTARI dalam kunjungan tersebut telah diadakan pertemuan dengan pedjabat² setempat dan pantjatangan.

Kebidjaksanaan tetap dipusat.

Lebih landjut ditambakkannya bahwa untung daripada ekonomi nasional kita itu akan didjamine, karena kebidjaksanaan tetap berada ditangan pusat. Penganturan pemakaian earnings (penghasilan) pun menurut kebidjaksanaan pusat.

Hasil atau tidak hasilnya usaha ini bergantung daripada local managers (pedjabat² setempat) bagaimana bekerdja dengan mengikut sertakan masyarakat setjara dinamis, sesuai dengan kondisi man power dan natural resources daerah itu sendiri. Jang penting untuk ini menurut Kas KOTARI Brig. Djen A. Jusuf ialah, adanya pimpinan jang tjakap, dan mempunjai pengetahuan ekonomi dan terutama berkepribadian serta berwatak. Melihat kekajaan alam Lampung, dapatlah ditaksir dengan hasil lada sadja daerah tersebut dapat membiyai Trans Sumatera highway seluruhnja. Didalam kunjungan di Dati I Lampung oleh Kas KOTARI telah pula diambil keputusan² setempat demi lantjarnja mekanisme perdagangan di Daerah itu. Antara lain telah dibentuk LADINDO (LADA INDONESIA) jang diharapkan akan mendjadi eksportir dan pendjual tunggal. Dalam hal ini sadja kita telah berhasil disatu segi berkonfrontasi dengan Nekolim, berkata Kas KOTARI. Upgrading bagi daerah ini lebih landjut akan diadakan dibidang² processing, packing dan skiil (keahlian).

Dengan kunjungan ke Lampung ini daerah tersebut mendjadi objek pertama KOTARI.

BUSINESS NEWS

BRIG. DJEN. A. JUSUF :

DAERAH BERDIKARI — NEGARA BERDIKARI

Demikian djudul berita dari Bulletin BUSINESS NEWS, tgl. 25-9-'65 jang menulis :

Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri Brig. Djen A. Jusuf jang djuga mendjabat Kepala Staf KOTARI dalam kunjungannya ke Daerah Lampung untuk mendjadi daerah tersebut Pilot Project daerah jang Berdikari menjatakan bahwa dengan berlandaskan pada kekajaan alam setempat jang harus dikombinasikan dengan man power serta daja tjiptanja, pasti daerah Lampung bisa Berdikari. Menurut Menteri, tegasnya berdikarinya daerah merupakan basis daripada berdikarinya Negara kita.

Selama kunjungan selama 21 dan 22 September jang lalu di Lampung Menteri telah memberikan briefing kepada pedjabat² perwakilan Deperda setempat, dan mengapproach semua instansi² jang bersangkutan dengan Perdagangan umumnja terutama dalam rangka export drive, serta meninjau pabrik² pengolahan lada dan kopi jang ada di Telukbetung. Sebagai puntjak daripada kunjungan itu tertjetuslah idee pembentukan LADINDO (LADA INDONESIA) jang akan menentukan kwalita serta harga lada dan tentunya pula politik perdagangannya di Luar Negeri.

Kepada pedjabat² setempat ber-kali² ditandakan oleh Menteri perlunya birokratisme diberantas untuk madju kepada peningkatan efisiensi kerdja demi prinsip „Pro bono publico”. Dan khususnya mengenai Lampung ditegaskan oleh Menteri bahwa tidak ada alasan apapun bagi daerah Lampung untuk menderita, mengingat kekajaan alam setempat jang berlimpah dan sudah terkenal didunia. Lada jang produksinja 30.000 ton setahunnja, karet 40.000 ton, kopi 8.000 ton belum lagi kaju, damar dan gaplek jang termasuk zwakke producten. Sehingga sebagai misal oleh Menteri dikatakan bahwa hanja dengan hasil lada sadja daerah Lampung dapat membiyai pembangunan Djalan Raya Lintas Sumatera.

Dalam peninjauan kepelabuhan Pandjang kepada unsur² jang mengangkut kepelabuhan sepanjang mengenai tugas² pelaksanaan kelantjaran eksport barang², diuraikan oleh Menteri betapa perlunya efisiensi kerdja ditingkatkan supaya para pedjabat dalam kewenangannya masing² berani bertindak mengambil keputusan dan kebidjaksanaan setempat demi „pro bono publico”. Kade jang dewasa ini hanja bisa disandar satu kapal, oleh Menteri disarankan supaya segera diperluas agar frekwensi pengeluaran barang² dapat terdjamin kelantjarannya, dengan dana dari daerah sendiri. Pusat hanja membantu dalam masalah pemikiran dan kebidjaksanaan.

Setelah mengadakan peninjauan pada 5 perusahaan pengolahan lada, kopi, djagung, (Bak & Bross), P.T. Nilakandi Ltd. P.T. Elyana, C. Kretek dan P.N. Dwikora jang kesemuannya berlokasi di Telukbetung, Menteri memperoleh kesan bahwasanja daerah Lampung sudah Berdikari dibidang processing, jang dahulunya jaitu sebelum

frontasi diselenggarakan oleh pihak Singapura. Dengan demikian maka keuntungan yang tadi jatuh ditangan pihak Singapura, kini masuk kantong kita sendiri. Kwalita lada AP I, AP II, AP III, dan kwalita kopi ex - I, II, III serta gubusta 20/25% dan kopi Rakjat sudah disortir sendiri oleh pabrik² yang bersangkutan. Dan orang dikira bahwa permesinan yang digunakan dalam processing itu berasal dari luar negeri. Kalau saja buatan dalam negeri sendiri, kualitasnya akan lebih baik daripada apa yang telah ditjapai oleh daerah Lampung, Menteri menegaskan agar untuk setiap commodity, kita bukan hanya memproduksi, tapi juga hendaknya mensortir, mengupgrade dan akhirnya mempakainya sendiri. Untuk lada commodity itu dapat sampai langsung ke tangan konsumen dengan kondisi ready to consume. Dalam hubungan ini Menteri menjatakan perlunya kita akan prototype eksportir yang mempunyai produktie apparaten sendiri. Mengenai packing oleh Menteri diberi gambaran untuk menginvestasikan sejumlah 1 djuta dollar atau 600 djuta Rp. sehingga kita bisa berdiskusi dengan bahan pembungkus berupa nylon yang dapat diperoleh dari pabrik² petro-kimia.

Mengenai proteksi dibidang industri, dalam rangka kerdja DPRD-GR Lampung yang dipimpin Menteri di Tandjungkarang belum menyinggung daerah Lampung ditandakan oleh Menteri bahwa pembangunan daerah Lampung jangan hanya dilandaskan kepada segi² komersial, tetapi juga dibidang idiiil demi kesedjahteraan rakyat. Menteri juga mengatakan bahwa daerah Lampung djuga hendaknya berindustri dengan dana dan dana dari swasta, sebab sekarang ini telah diambil kebidjaksanaan oleh pemerintah untuk memberikan proteksi kepada industri (termasuk industri dibidang agraris) supaya disamping menghasilkan, djuga tenaga kerdja dapat disalurkan penggunaannya. Menegaskan bahwa serasi dengan kebidjaksanaan itu, pendirian P.T. 2 hanya diberikan waktu sependjang menjangkut pembukaan kerdja yang baru.

Menteri di Tandjungkarang belum menyinggung daerah Lampung ditandakan oleh Menteri bahwa pembangunan daerah Lampung jangan hanya dilandaskan kepada segi² komersial, tetapi juga dibidang idiiil demi kesedjahteraan rakyat. Menteri juga mengatakan bahwa daerah Lampung djuga hendaknya berindustri dengan dana dan dana dari swasta, sebab sekarang ini telah diambil kebidjaksanaan oleh pemerintah untuk memberikan proteksi kepada industri (termasuk industri dibidang agraris) supaya disamping menghasilkan, djuga tenaga kerdja dapat disalurkan penggunaannya. Menegaskan bahwa serasi dengan kebidjaksanaan itu, pendirian P.T. 2 hanya diberikan waktu sependjang menjangkut pembukaan kerdja yang baru.

T A R A

LAMPUNG MENDJADI PILOT PROJEK PERTAMA KOTARI

Sehubungan dengan judul berita Bulletin LKBN „AN-1” tgl. 23 - 9 - '65 yang selandjutnja menulis : Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri Brig. Djen. Jusuf yang djuga mendjabat Kepala Staf Kolonial kundjungannya ke Lampung selama hari telah mendjadikan daerah itu sebagai proyek pertama KOTARI agar dalam waktu dekat mungkin dapat berdiskusi dibidang ekonomi. Berhubung Lampung merupakan daerah

jangkaja dengan berbagai hasil bumi seperti lada, karet, kopi dan lain².

Menteri dan rombongan terdiri dari pedjabat² Deperdag, Perusahaan Niaga Negara, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Sementara, kementerian petang tiba kembali di Ibukota setelah mengadakan peninjauan ke beberapa pabrik pengolahan lada dan kopi serta mengadakan pertemuan dengan wakil PNN, GPEIS dan pengusaha swasta setempat.

Sebagai tjontoh dikemukakan oleh Brigdjen. Jusuf bahwa pendapat hasil bumi daerah Lampung sudah tjukup untuk membiayai djalan raya lintas Sumatera yang akan menelan biaya lebih Kurang US\$ 200.000.000,—. Dengan demikian bagi daerah Lampung tidak ada alasan untuk kekurangan dibidang apapun, karena hampir semua bahan² terkumpul didaerah itu dan yang diperlukan sekarang adalah pembinaan yang sebaik²nja dari man power dan kekayaan alam yang ada.

Berbitjara tentang lada yang merupakan hasil terbesar daerah Lampung yang mensupply lebih kurang 60% dari kebutuhan dunia. Menteri mengumumkan bahwa dalam hal ini seharusnya Indonesia sendiri yang menentukan harga lada dipasaran dunia dan tidak seperti waktu yang lampau luar negeri yang harus menentukan lada kita.

Selanjutnja dikatakan bahwa pembantingan stir dibidang ekonomi berarti bahwa kita tidak lagi boleh menggunakan tjara² yang konvensional atau norma² yang sudah usang, tapi norma² baru yang harus disesuaikan dengan keadaan yang ada.

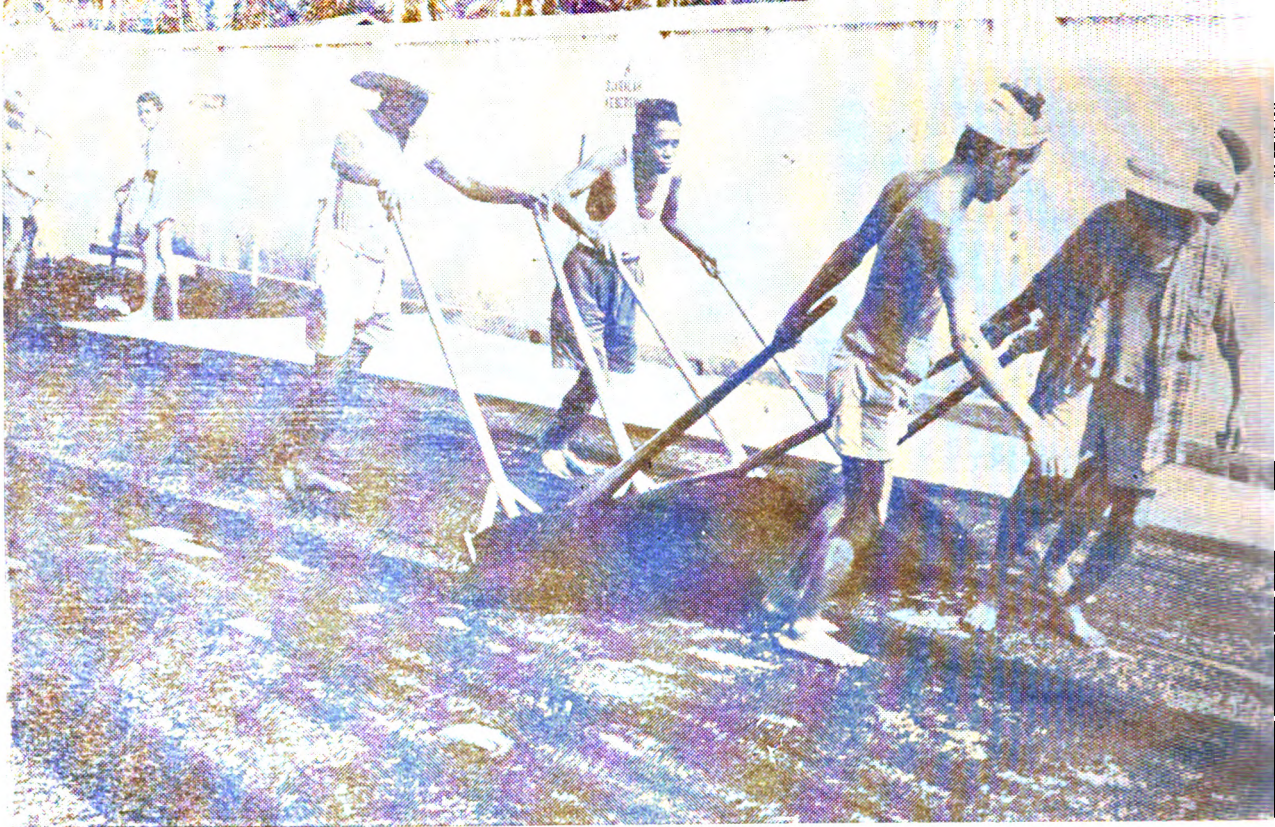
Disamping itu untuk dapat berdiskusi kita harus memeras keringat dan berani mengambil tindakan yang tepat dan tjepat, tapi utjapan dan tindakan harus selaras.

Hal itu ditjapkan oleh Brig. Djen. A. Jusuf dalam sambutannya pada malam resepsi di WISMA RIA Lampung Selasa malam yang lalu diadakan oleh Gubernur Lampung Koesno Danupojo untuk menghormat kedatangan Menteri dan rombongan.

Dasar ekonomi nasional terletak didaerah.

Mengenai kesan²nja setelah meninjau daerah Lampung Menteri menjatakan bahwa dasar dari pada ekonomi nasional kita terletak didaerah² dan dengan kekayaan alam yang ada daerah² dapat membangun dengan kekuatan sendiri. Dalam hubungan ini Menteri akan memberikan wewenang yang lebih besar kepada daerah² itu dan pusat hanya menentukan kebidjaksanaan umum. Berhasil atau tidaknja usaha itu tergantung daripada pimpinan daerah yang harus mengikut sertakan seluruh masyarakat dari petani² sampai pengusaha² dan tergantung pula dari ketjakinan menentukan kebidjaksanaan dan pengetahuan dibidang ekonomi.

Selanjutnja dibidang perdagangan Lada akan



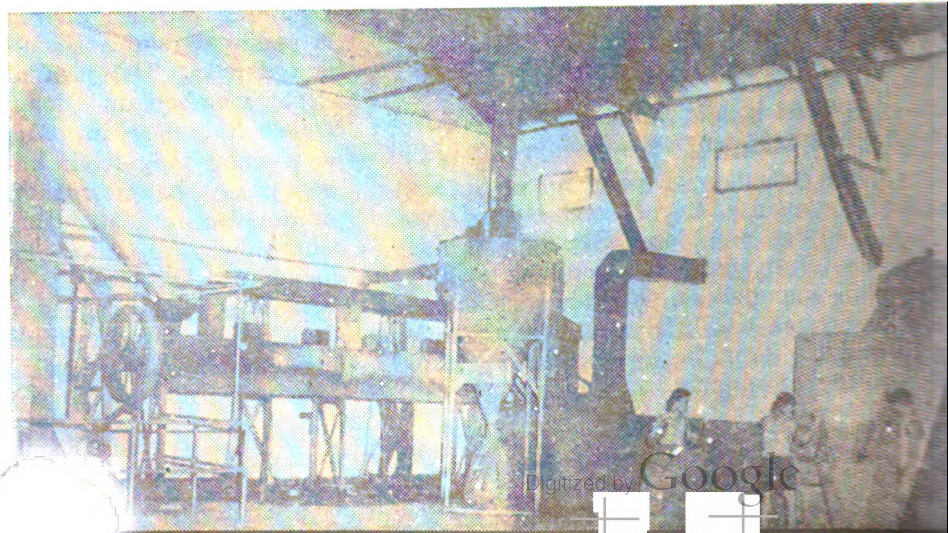
↑
 Daerah adalah basis ut
 Ekonomi Nasional kita
 Dari hasil lada dae
 Lampung sadja, pem
 ngunan Sumatra High
 dapat dibiajai.

Hampan lada se
 didjemur.

Foto : Depp



Mesin Pengolah Lada



dibentuk suatu organisasi yang akan diberi nama LADINDO atau Lada Indonesia yang kelak akan menjadi eksportir tunggal daripada Lada Indonesia.

Setelah mengadakan peninjauan ke beberapa pabrik pengolahan lada dan kopi baik milik swasta maupun P.N., yaitu **Pabrik Pengolahan Lada Dwikora**. Menteri menyatakan bahwa hasil konkrit daripada konfrontasi ialah bahwa kita dapat mengolah sendiri hasil² bumi seperti lada, karet dan kopi yang pada sebelum konfrontasi dilakukan di Singapura.

Demikian Brigadir Djenderal A. Jusuf

DUTA MASJARAKAT

LAMPUNG PILOT PROJEK PERTAMA KOTARI

Dengan Lada Sadja Sumatera Highway bisa dibijai.

Dengan judul diatas Surat kabar DUTA MASJARAKAT, dalam terbitannya tgl. 24-9-'65 minggu selanjutnya menulis :

Menteri — Kepala Staf KOTARI Brigdjen. A. Jusuf setibanya dilapangan terbang Kemajoran Abu petang menerangkan kepada pers, bahwa daerah bisa membangun sendiri, asal ada daja dan usaha untuk sungguh² berdiri diatas kaki sendiri.

Untuk ini Menteri telah 2 hari mengadakan peninjauan di Lampung dimana beberapa pabrik lada dan kopi serta pelabuhan Pandjang tindaunya, dan Menteri telah memberikan ris² tentang arti dan doktrin berdikari.

Dikatakan oleh Menteri — Kas KOTARI, bahwa daerah merupakan basis² dari ekonomi kita, dimana dengan menggunakan man power yang ada dan alat² industri yang sudah ada dapat membangun daja kerdja dan daerah akan dapat membangun daerahnya sendiri dan akan membantu pula income nasional kita.

Tapi semuanya itu djuga akan berhasil, diika mempunyai local manager yang tjakap yang bisa menggunakan kekayaan alam dan pengetahuan yang dimilikinya.

Bisa bijai karya Sumatera highway

Kalau hal ini dibina benar² dengan se-baik²nja, maka hasil yang ditjapai oleh daerah Lampung bisa membijai karya Sumatera Highway, bahwa kalau hasil lada hitam sadja dipergiat produksinya, maupun processingnya maka dengan lada lada, Sumatera Highway bisa dibijai. Karena telah dikenalja lada oleh luar negeri, maka cukup membina selanjutnya, dan dalam rangka strategi berdikari ini Menteri Kas KOTARI telah mengambil keputusan, membentuk badan „LADINDO“; yang sole-exporternja maupun penjudia dilakukan dan didjalankan oleh kita sendiri. Ini oleh para produser swasta di Lampung berjata mendapat dukungan sepenuhnya untuk

melaksanakan. Dalam pada itu, Menteri — Kas KOTARI Brigdjen. A. Jusuf telah menyatakan dalam suatu resepsi, bahwa Lampung merupakan Pilot — Projek pertama KOTARI dalam rangka berdikari ini.

Dapat diterangkan pula, bahwa Menteri Kas — KOTARI dalam peninjauannya ke Pelabuhan Pandjang telah menggariskan pula tentang beberapa masalah ekspor, maupun kwalita daripada barang yang diekspor, dimana Menteri menginstruksikan kepada perwakilan perdagangan Lampung, Duane, B.L.L.D. untuk menentukan jenis daripada barang ekspor itu dengan kwalita Lampung sendiri, menurut mutunya masing, sehingga dengan demikian, Menteri Kas — KOTARI telah berhasil menggariskan pula pokok² ekspor baik nama maupun kwalitannya, yang dengan demikian kita berdjuaug dalam lapangan ekonomi melawan pasaran ekonomi imperialis.

SINAR HARAPAN

BADAN PERDAGANGAN LADA

Harian sore SINAR HARAPAN, tgl. 23-9-'65 dengan judul diatas menulis :

Dalam kunjungan singkatnya ke Dati I Lampung pada tgl. 22 September jl. Menteri Perdagangan A. Jusuf telah membentuk Badan Perdagangan Lada untuk memperlantjar mekanisme perdagangan lada daerah tsb., mengkoordinasi produksi setempat dan untuk mentjapai mutu standard quality Indonesia. Djuga diluar negeri akan dibentuk badan pendjual lada yang merupakan penjambung (verlengstuk) dari badan yang dibentuk di Lampung itu, dan akan mendjadi sole-buyer dan sole eksporter dari pada lada Lampung.

Dengan demikian diharapkan posisi pendjualan lada R.I. yang mentjangkup 40 pct dari produksi dunia, akan diperkuat dalam melawan konfrontasi melawan Nekolim karena dengan adanya badan ini terhimpun kekuatan nasional dalam satu front. Dalam rangka melaksanakan prinsip Berdikari, oleh Menteri A. Jusuf dinjatakan Lampung sebagai pilot projek KOTARI yang pertama. Dengan berdikari ini dimaksudkan agar dengan memakai segala daja dan tenaga kita serta alam seefisien mungkin kita dapat berdiri diatas kaki kita sendiri. Dikatakan oleh Menteri setibanya kembali di Djakarta, Rabu siang dari Lampung, bahwa daerah Lampung adalah penghasil kekayaan alam dengan kekuatan² yang ada padanya setjara langsung dapat memperbesar pendapatan nasional (national income) kita.

Selama peninjauannya ke Lampung Selasa j.l., Menteri A. Jusuf dan rombongan telah melihat dari dekat kegiatan² pada pabrik pengolahan lada dan kopi Bakrie & Bros, pabrik Kretek dan pabrik pengolahan lada negara Dwikora serta pabrik Elyana.

BAHAN BAKU UNTUK PRODUKSI SANDANG KEARAH BERDIKARI DALAM BIDANG SANDANG

I. TINDJAUAN UMUM.

Bahwa masalah sandang disamping masalah pangan dalam rangka mentjapai Tri Sakti Tavip, ialah berdikari dibidang ekonomi, adalah masalah jang sangat penting tak perlu kiranja ditondjolkan lagi.

Sekedar tulisan saja dalam turut mengisi MUBES Sandang Nasional ke-I, inipun lebih bermaksud untuk turut mentjari pemetjahan setjara praktis, bagaimana mentjapai tudjuan Berdikari dibidang Sandang tersebut.

Tiga sumber utama bahan baku, ialah kapas, rayon dan sutera alam, jang telah dimulai atau sedang diusahakan sebagai sumber-sumber utama bahan baku sandang ingin kami sorot sebentar — agar tiga sumber utama ini dapat kita nilai jang wajar.

Rupa-rupanja sampai dengan hari ini, harapan dan usaha ditudjukan sebagian terbesar kepada kapas sebagai bahan baku utama untuk sandang. Banjak pabrik² pinal dan tenun, baik bermesin maupun tak bermesin didirikan. Andaikata penanaman kapas dalam unit-unit jang luas dapat berdjalan lantjar, kiranja masalah sandang ini, dengan adanja usaha-usaha luas dibidang pinal dan tenun dan suksesnja penanaman kapas setjara luas — sebagian besar telah teratasi.

Ternjata dalam bidang usaha ini, kesulitan terletak pada produksi bahan baku ialah meghasilkan kapas untuk dipinal mendjadi benang untuk kemudian diolah seterusnya.

Ada jang menjorot kesulitan² dari segi cultuur-technis, ada jang dari segi marketing, ada lagi dari segi mismanagement dsb. — tetapi jang terang, kapas sebagai tanaman di Indonesia sedjak dulu sudah dikenal. Alam Indonesia sangat murah. Tanah pada umumnja tjukup luas dan baik. Persediaan air, d.l.l. persjaratan iklim, walaupun tak untuk seluruh Indonesia sama baiknja untuk kapas, toch kiranja masih tjukup ada daerah-daerah jang dapat memberi tempat kepada penanaman kapas dalam djumlah luas jang tjukup.

Dengan demikian, kiranja usaha penanaman² setjara luas untuk produksi kapas tak perlu dihentikan, bahkan lewat pertjobaan² jang banjak, pilot projects, dsb. dsb. perlu diperhebat, sehingga masalah produksi bahan baku jang vital ini dapat achirnja terkuasai penuh.

II. RAYON.

Sumber utama kedua, jang diharapkan sebagai sumber bahan baku untuk sandang pada zaman modern ini adalah kaju² sebagai bahan baku jang dengan matjam² proces teknologi dimasak mendjadi bubur (pulp) jang achirnja dapat diusahakan mendjadi benang² rayon — memberi bahan sandang jang tjukup baik dan dapat diusahakan dalam djumlah jang besar.

Bila di Indonesia kaju ditinjau kedudukannya sebagai bahan baku sandang, maka keadaan ini adalah kebalikan dari pada kapas.

Persediaan hutan² jang mengandung kaju jang baik untuk pulp dan rayon — adalah tjukup luas. Sajangnja, kalau kapas sebagai bahan baku untuk didjadi benang tenun tak membutuhkan proses jang sulit dan eventueel dapat dilajak dengan alat² jang sederhana, sebaliknya untuk mengolah kaju mendjadi benang tenun rayon dibutuhkan processing jang tjukup rumit, kiranja dibutuhkan alat² dan bahan² pembuat jang banjak dan achirnja mahal.

Tetapi sekali alat² ini sudah ada, pabrik rayon itu akan mendjamin suatu produksi jang kwalitatif tjukup besar, kwalitatif tjukup baik dengan kostprijs jang tjukup rendah.

Djadi berdasarkan adanja potensi jang besar di sektor kaju sebagai bahan baku jang sudah sedia ini, berdasar kwalita dan kostprijs jang dapat dipertanggungjawabkan untuk produksian sandang jang murah, maka sepantasnja sektor kaju sebagai sumber utama bahan baku sandang, dapat perhatian jang besar.

Karena pengolahan kaju mendjadi rayon selalunya membutuhkan investasi jang tinggi, maka achirnya penting sekali ialah adanja penelitian, survey planning jang sebak²nja sebagai tindakan-tindakan prasarana jang mutlak perlu diadakan untuk mendjamin suksesnja usaha.

Kebidjaksanaan jang tinggi perlu diadakan untuk mensukseskan unit² rayon jang pertama sekiranja unit² pertama itu telah berhatsil, maka akan terbukti bahwa kaju/hutan-hutan di Indonesia sebagaimana kita miliki sekarang ini memberikan kemungkinan² jang praktis tak terbantahkan dan potensi² jang maha besar dalam penediaan bahan baku untuk sandang.

III. SUTERA ALAM.

Salah satu sumber, jang kelihatannja lux, tetapi toeh ada kemungkinan untuk diperkembangkan mendjadi sumber bahan baku untuk sandang jang tjukup berarti adalah sutera alam.

Bukan maksudnja untuk menguraikan segi² teknis persuteraan alam ini, tetapi beberapa angka dan fakta² perlu disinggung agar persuteraan ini pun dapat mejakinkan kita sebagai sumber bahan baku sandang jang tjukup vital.

Rumus sutera sebenarnja amat mudah :

± 200 kg daun moerbei oleh ± 5.000 sampai 10.000 ekor ulat, di robah mendjadi benang sutera dalam waktu lebih kurang 1 bulan.

Unsur² pokok untuk perkembangan persuteraan di Indonesia keadaannja adalah sbb. :

- 1— murbei atau besaran dapat tumbuh praktis dimana-mana, dari dekat permukaan laut sampai ke gunung²; diatas tanah matjam Gunung Kidul apalagi ditamah-tamah jang subur.
- 2— ulat²nja pun ternjata tak begitu sukar untuk mengembang-biakkannja diberbagai iklim di negara kita.
- 3— dari filamen² (benang) jang dihasilkan oleh ulat (berupa kepompong) sampai dibuat mendjadi benang terus di tenun mendjadi bahan pakaian, sarung dan lain sebagainya — tak dibutuhkan alat² jang rumit². Bila perlu 100% alat² tersebut dalam proses produksi dari A sampai, Z, dapat di produser dalam negeri.

Pada hakekatnja perkembangan sutera alam untuk Indonesia adalah tergantung dari :

- tanaman moerbei jang luas;
- masyarakat pemelihara ulat sutera jang terorganisasi, dilindungi, dipimpin;
- alat² reeling (pintal) dan weaving (tenun) jang bila perlu 100% dapat di usahakan dalam negeri, jang kesemuanja itu dapat ditjapai tjukup dengan modal, terutama ketekunan.

Potensiil sebagai sumber bahan baku sebenarnja pun tak ketjil artinja.

bagai tjontoh produksi Sutera di Djepang, ng notabone ditindjau dari sudut fakta² alamiah adaannja tak sebaik seperti di Indonesia, mendjukkan angka² sbb. :

Produksi 1964 = ± 20 djuta kg. raw silk atau ± 400 djuta meter kain sutera. Persuteraan di Djepang di usahakan diatas areaal seluas ± 160 ribu H.A. tanah. Produksi tersebut berarti ± 4 meter kain per capita bagi rakjat, jang djumlahnja ± 100 djuta manusia.

Sutera alam, walaupun kelihatannja lux, sebenarnja pengusahaannja sederhana. Dari cultuur sampai finishing dapat diusahakan setjara sederhana, berdikari 100% bila perlu. Hasilnja kwanitatif dan kwalitatif dapat dipertanggungjawabkan.

IV. KESIMPULAN.

Dari uraian diatas jang serba singkat itu dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1— Produksi sandang untuk memenuhi kebutuhan rakjat Indonesia pasti dapat diusahakan pada waktunja setjara berdikari.
- 2— di bidang kapas, masalahnja terutama terletak pada produksi bahan baku, ialah terutama di bidang cultuur.
- 3— di bidang kaju/rayon masalahnja terletak di bidang pengolahan/teknologi dan investasi modal.
- 4— sutera alam memiliki faktor² produksi dari cultuur sampai finishing jang sederhana — karenanja dengan ketekunan dapat mudah diperluas.
- 5— Dengan :
 - a — usaha perluasan kapas.
 - b — pembangunan pabrik² rayon.
 - c — perluasan usaha persuteraan alam produksi sandang memiliki landasan materiil jang tjukup kuat dan memiliki kepastian untuk dapat ditingkatkan mendjadi usaha jang benar² berdikari.

R A Y O N

Rayon sebagai bahan baku untuk produksi Sandang.

Jang dimaksud dengan rayon ialah benang² jang dibuat dari selulosa atau dari derivat-selulosa. Selulosa terdapat pada semua tanam²an jaitu dalam bentuk jang tidak hanjak lagi memerlukan pengolahan berupa bulu sekeliling biji dji kapas dan kapok; berupa serat daun² pada nanas, pisang dan azave berupa pembungkus buah pada kelapa; berupa serat batania pada bambu, tebu dan merang dan selandjutnja berupa kaju dalam pohon²an.

Menurut angka² mengenai produksi dunia dari seluruhnja rayon jang dihasilkan, 90% adalah menurut prosede viskos, 7% menurut prosede asetat dan 3% menurut prosede cuoxam.

Djadi viskoslah jang terbanjak dipakai. Rayon itu dimaksudkan semula untuk mengganti sutera ra (sutera jang dihasilkan ulat² sutera), karena itu rayon itu dahulu dinamakan sutera buatan Nama itulah jang menjebabkan banjak orang hingga sekarang masih menjangka, bahwa rayon itu hanja dapat dipakai untuk membuat badju wanita.

Dalam pada itu pengetahuan mengenai rayon sudah sedemikian berkembang, sehingga pada waktu sekarang benang rayon sudah dapat menggantikan setiap djenis benang jang lain, akan tetapi kebanyakan rayon itu dipergunakan dalam tjampuran dengan benang jang lain.

Pentjampuran dilakukan untuk mengubah atau memperbaiki kwalita, umpamanja sadja rayon ditjampur dengan bulu atau kapas, supaja rayon itu memperoleh sifat² bulu dan kapas. Rayon itu ditjampur dengan kapas, rami bulu, decron dan serat² buatan lainnja. Kemadjuan dalam teknologi baru sampai pada pentjampuran jang mengizinkan bagian rayon sampai 70%. Djadi angka 70% ini dilampaui, maka sifat² jang khusus dari bahan jang ditjampur itu tidak diperoleh lagi, se hingga sama sadja dengan „pure-rayon“.

Rayon itu merupakan :

1. Filament fibres, jaitu benang jang tidak terputus-putus tidak ubahnja dengan bahan sutera-alam.
2. Staple fibres atau staple rayon jang pandjanganja 25 sampai 200 mm.; mengenai pandjanganja staple fibres itu menjerupai kapas, jang pandjanganja antara 20 sampai 40 mm.

Ratio mengenai besarnja produksi filament fibre dan staple fibre adalah berlainan dinegeri jang satu dengan dinegeri jang lain.

Pemakaian Rayon.

Filament rayon dipergunakan untuk membuat pelbagai matjam sandang jang disulam, untuk pakaian dalam, pakaian wanita, kemedja dan untuk berbagai-bagai keperluan sebagai pengganti bahan sutera. Permukaannja halus dan mengkilap. Untuk mengubah kwalitanja filament itu ditjampur dengan serat² djenis lain.

Demikian djuga halnja dengan staple fibre jang sering kali ditjampur dengan serat lain sebagai kapas, rami, sutera bulu dan lain². Staple fibre dapat menjerupai setiap djenis serat, sehingga tjotjok untuk setiap matjam pakaian, baik untuk wanita maupun untuk pria dan selandjutnja djuga untuk kain pintu dan djendela, untuk kain pelapis (bekleding), untuk permadani dan lain².

Suatu sifat jang khusus pada rayon ialah kesanggupannja menghisap air (keringat), dan afinitanja jang luarbiasa akan bahan² tjat.

Selain dari sifat tersebut salah satu jang memberikan keseimbangan ialah sifat warnanja. Kalau ditjelup, staple fibre itu mengeluarkan warna jang bersemerak sampai mengalahkan serat² jang lain, bahkan adakalanja orang menganggapnja terlalu mengkilap, sehingga waktu masih merupakan viskos diperlukan untuk memberikannja warna jang sedikit gelap dengan bahan pigmen biasanja berupa titan-dioksida (TiO₂).

Selandjutnja untuk mentjegah berkerutnja, dipergunakan rayon, ilmu kimia dan teknologi telah memperoleh hasil² jang sangat pesat, sehingga kian hari nilai serat ini kian tinggi. Variasi jang dapat ditjiptakan dengan rayon adalah dja-

uh lebih banjak daripada dengan serat² jang lain baik variasi mengenai rupa maupun mengenai konstruksi, efek² warna dan lain².

Disamping penggunaannja untuk tekstil, serat rayon dipakai djuga untuk bidang² industri karet buat ban-luar, ban-dalam, tali-kipas, pipa dan lain². Untuk maksud ini dibuat benang rayon dengan tjara jang serupa seperti membuat filament fibre tetapi tebal dan dengan kekuatan tahan tegang jang besar (high tensile strength).

Diatas ini kita telah menjebut rayon jang dibuat menurut prosede asetat. Rayon asetat ini mempunjai sifat² physis tersendiri. Jang antarlain patut disebut ialah bahwa bahan jang dibuat dari djenis benang ini tidak tembus air. Hampir tidak dimilikinja kesanggupan absorpsi terhadap keringat, sehingga tidak seberapa tjotjok untuk dijadikan bahan pakaian dalam daerah panas. Rayon asetat ini banjak dipergunakan untuk djas hudjan, pajung, bahan² pembungkus jang memberi perlindungan sempurna terhadap air. Dalam pada itu perkembangan perindustrian njata sekali membuktikan bahwa jang banjak dihasilkan ialah rayon jang dibuat menurut prosede viscose.

Untuk membuat rayon viskos, bahan selulosa itu diperoleh darikaju. Sebermula jang dipergunakan hanjalah kaju pohon jang termasuk kelas arga conifer atau kaju djarum.

Selama perang dunia pertama Djerman daerah² jang didudukinja, selulosa itu dari pohon Fagus silvatica karena pohon ini tersedia diwilayah sendiri sehingga tidak perlu diimpor tetapi kwalitanja tidak seberapa memuaskan karena banjak mengandung pentosaan. Dalam pada itu dipeladjar djuga kemungkinan² untuk memperoleh selulosa dari merang, dari Arundo donax (Italian reed dsb).

Penggunaan rayon dinegara-negara jang tenis/ekonomis maju dewasa ini terus meningkat. Sesuai dengan kemadjuan teknologi jang diademi dinegara-negara tersebut, maka rayon sebagai bagian dari chemical fibre djuga meningkat. Naikan ini begitu pesat hingga mendorong tuas pemakaian cotton/kapas. Hal ini dapat dilihat dinegara-negara :

1. Amerika :
FIBER CONSUMPTION IN U.S. (*)
(% of total Consumption)

F i b e r	1930	1940	1950	1951	1952
C o t t o n	85	80	69	72	71
W o o l	85	80	69	72	71
S i l k	3	3	—	—	—
Regenerstat (Rayon)	3	9	21	21	20
Syntetic	0	0	2	3	4

(*) T.H. Clayton, „The Textile Trade and Fiber Fibers” journal of Society of Dye and Colorists, 70 : 7 - 13 Jan. 1954.

D j e p a n g :

FIBER CONSUMPTION IN JAPAN (**) (% of total Consumption)

	1937	1962	1963
Wool fiber	65.0 %	36.8 %	33.7 %
Wool fiber	6.0	10.8	10.4
Wool fiber	4.5	1.6	1.4
Wool Staple fiber	21.0	31.3	31.8
Synthetic fiber	—	13.4	16.4

RAYON DI INDONESIA.

Guna memenuhi kebutuhan bahan sandang, Indonesia sangat tergantung dari bahan² pakaian yang diimpor dari luar negeri, jaitu :

sebagian besar bahan tekstil djadi jang berupa bahan pakaian, dibuat dari kapas, wol, rayon sutera alam dan serat-sintetik;

benang tenun untuk keperluan industri pertenunan, jang bahan bakunja ialah kapas, sutera alam dan sutera buatan (rayon);

serat tekstil (kapas, sutera alam, rayon, wol dan bulu buatan) untuk keperluan industri pemintalan.

Produksi dalam negeri dari bahan² baku untuk pakaian, terutama kapas, baru meliputi sebagian kecil saja dari kebutuhan. Hampir seluruh kebutuhan dibidang sandang dengan demikian harus diimpor, jang berarti pemakaian devisen yang tidak sedikit djumlahnja.

Salah satu program Pemerintah adalah bahwa Indonesia tidak lagi tergantung pada luar negeri, melainkan dapat memenuhi sendiri kebutuhan sandangnja. Maka perlu sekali diusahakan self-supporting dalam bidang bahan baku, mengingat bahwa dewasa ini Indonesia telah memiliki mesin² pertenunan dan pemintalan jang modern, tetapi kapasitasnja belum dapat dipergunakan secara efektif.

Dalam hal ini telah direntjanakan untuk membangun industri rayon a.l. di Sumatera Selatan, dengan mengadakan perbaikan, perluasan pemintalan kapas dan rami, pembangunan pabrik² pemintalan dan pertenunan baru, serta memelihara, mengembangkan industri² jang telah ada.

Usaha Pemerintah untuk membangun industri sandang seperti tersebut diatas adalah penting bagi artinja bagi perekonomian negara, jaitu :

Penghematan pemakaian devisen dengan mengurangi impor tekstil dan bahan baku untuk industri tekstil dalam negeri.

Memelihara kestabilan harga tekstil dan benang, jang sering mendjadi bahan spekulasi.

Menambah lapangan kerdja dan menaikkan pendapatan nasional jang dapat memperbaiki taraf penghidupan.

) „HITACHI ZOSEN NEWS” No. 46
March 1965.

Menurut angka² statistik Biro Pusat Statistik dalam tahun 1961 telah diimpor serat tekstil kasar sedjumlah kira² 13.000 ton, jaitu kapas 12.000 ton, serat sutera alam dan buatan 700 ton dan bulu² binatang dan buatan 300 ton. Djumlah benang tenun jang diimpor ialah kira² 53.000 ton, jaitu benang kapas 47.200 ton, benang sutera buatan (rayon) 5.800 ton (terdiri dari filament yarn 200 ton dan staplefiber yarn 5.600 ton) dan benang sutera alam 4 ton.

Angka² diatas menundjukkan bahwa rayon telah dapat dikerdjakan pula oleh sebagian perusahaan² pemintalan maupun perusahaan² pertenunan jang terdapat disini, akan tetapi menurut keterangan pada umumnya ditjampur dengan kapas. Dalam rangka pembangunan industri sandang ini, alat² pertenunan dan peradjudan jang kita miliki sekarang potensil telah mampu untuk memproduksi tekstil sebanjak 1,7 milyar meter setahun, jang berarti telah melampaui target M.P.R.S. untuk tahun 1968. Dengan demikian peralatan pertenunan sudah bukan merupakan problem lagi. Problem jang sangat urgen untuk diselesaikan sekarang terletak dibidang bahan baku, jaitu kapas dan rayon.

Tentang kapas sebagai bahan baku perusahaan-perusahaan pemintalan, mengenai usaha dalam negeri dewasa ini sedang dilakukan penanaman² kapas a.l. di Nusatenggara (Sumba dan Sumbawa) dan di tempat² lain sedang direntjanakan penanamannja. Tetapi hasilnja baru meliputi 10% saja (i.k. 2.000 ton) dari djumlah kapas jang biasa diimpor setiap tahunnja, jang berarti masih djauh dari mentjukupi kebutuhan dalam negeri, sedang di Indonesia kini terdapat kira² 240.000 mata pintal jang harus dilajani.

Adapun industri rayon hingga kini pembangunannja masih mengalami penghambatan disebabkan karena kesukaran² dalam supply bahan bakunja. Disamping itu pada waktu sekarang sedang dipergiat pula pemeliharaan² ulat sutera dan penanaman² murbeinja.

BAHAN BAKU (KAJU) UNTUK RAYON.

Sebagaimana telah dikatakan, problem sandang jang sangat urgent untuk diselesaikan terletak dibidang bahan baku, jaitu kapas dan rayon.

Bahan baku untuk keperluan pembuatan rayon biasanja ialah kapas ataupun kaju, diluar negeri kebanyakan dari djenis² kaju djarum. Di Indonesia persediaan kaju berlimpah², baik berupa djenis² kaju daun maupun djenis kaju djarum.

Penelitian tentang kaju²an untuk rayon sedjak tahun 1957 telah dimulai dan sebenarnja sudah tjukup untuk memulai pembangunan projeknja, sekaligus untuk pulp selulosa dan serat rayonnja.

Berdasarkan penjelidikan laboratorium, disini terdapat berbagai djenis kaju daun jang baik untuk dijadikan bahan baku rayon, a.l. Eucalyptus, beberapa djenis Shorea, dsb. jang tumbuh dalam hutan² alam. Dengan demikian hutan² rimba jang ada dinegara kita ini dapat merupakan gudang

bahan mentah yang dapat dijadikan bahan baku untuk penang tekstil rayon.

Akan tetapi, walaupun berbagai jenis kayu daun itu baik untuk keperluan pembuatan rayon, didalam hutan alam jenis-jenis kayu itu tumbuhnya bertjampuran atau terpentjar sedemikian rupa hingga eksploitasi setjara pilihan dari jenis² kayu tertentu itu khusus untuk keperluan pembikinan pulp rayon masih merupakan persoalan yang tidak mudah dipetjahkan, seperti halnya dialami oleh projek rayon Sumatra Selatan. Pelaksanaan pembangunan projek ini, terutama pendirian pabrik pulpnya masih memerlukan waktu, disebabkan karena supply bahan kayunya belum terdjamin.

Lain halnya, djika ber-puluh² jenis kayu yang terdapat di hutan alam itu dapat diolah atau dimasak setjara tjampuran. Akan tetapi hal ini belum memberikan kemungkinan kearah itu, bahkan untuk pembuatan pulp kertas pun, yang sjarat²nya lebih ringan daripada yang diminta untuk keperluan pembikinan rayon, pengolahan tjampuran dari jenis² kayu hutan alam tropik seperti di negara kita ini belum pernah dilakukan orang setjara komersial.

Karena hal² diatas ini, ditambah pula dengan kesulitan² dalam hal penanamannya, maka pada taraf pertama industri pulp/rayon itu sejogjanja dipusatkan kepada penggunaan satu atau dua jenis kayu tertentu sadja, dalam hal ini jenis² kayu djarum yang setjara murni tumbuh di hutan alam ataupun yang telah ditanam setjara besar²an jaitu di Sumatera dan Djawa. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan telah terbukti bahwa Pinus merkusii yang terdapat disini adalah baik untuk keperluan pembikinan serat rayon.

HUTAN ALAM SEBAGAI SUMBER INDUSTRI PULP.

Menurut rentjana Depernas, pabrik² rayon akan didirikan 2 buah di Sumatera Timur dan Selatan dan 2 buah lagi di Kalimantan Tenggara dan Tengah, sedang yang satu lagi belum di tentukan tempatnja. Dengan mengangap bahwa di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tenggara tidak terdapat kayu djarum, maka hal ini berarti bahwa yang akan dipergunakan ialah terutama jenis² kayu daun yang tumbuh bertjampuran di hutan alam didaerah-daerah tersebut.

Bagi Indonesia pembangunan industri pulp/rayon ini adalah wadjar, karena mempunyai potensi yang sangat besar, djika mengingat kepada luasnja hutan alam yang terdapat diluar Djawa, yang hingga kini belum dipergunakan setjara ekonomis dan pula djika diingat bahwa kayu — terutama jenis² kayu djarum — merupakan bahan baku yang utama dalam pembuatan pulp.

Berbagai wilayah hutan memberikan banyak kemungkinan untuk membangun industri hasil hutan guna menggali kekayaan alam yang berlimpah-limpah itu dan guna memperluas la-

pangan kerdja yang erat hubungannya dengan program transmigrasi. Ketjuali di beberapa daerah dimana terdapat hutan² murni dari beberapa jenis kayu, hutan² diluar Djawa pada umumnya terdiri atas tjampuran ber-puluh² bahkan ber-ratus² jenis kayu daun, yang suatnja ber-beda², misalnja dari yang sangat ringan dan lunak sampai ke yang sangat berat dan keras sedang warnanya kajupun berlainan pula dari yang muda sampai yang berwarna tua, dan lain sebagainya. Demikian pula penjebarannya dari tempat ke tempat sangat berlainan, karena keadaan air, perbedaan tanah dan tempat tumbuh lainnya, sehingga komposisi dari hutannya itu tidak mudah ditentukan.

Hingga sekarang eksploitasi dari hutan alam pada umumnya ditunjukkan kepada penebangan jenis² kayu tertentu sadja yang sudah mendapat pasaran, terutama untuk keperluan bangunan dan pertukangan, djadi setjara pilihan sadja yang mengakibatkan banjaknja pohon-an dari jenis² lainnya yang tidak/belum mendapat perhatian dari masyarakat ketinggalan di hutan, sedang pada waktu penebangannya pun banjak kayu yang terbuang begitu sadja.

Djika hendak mengadakan eksploitasi yang se-baik²nya, maka perlu adanya sesuatu industri atau gabungan industri yang dapat mempergunakan segala jenis kayu yang terdapat dalam hutan itu, sehingga dengan demikian hutannya dapat ditebang seluruhnja. Dengan sendirinya harus ada ketentuan, bahwa lapangan² yang ditinggalkan habis itu dipermudahkan kembali, baik setjara buatan maupun alami, dengan tujuan mereka dapatkan hutan baru yang komposisinya sesuai dengan kebutuhan industri yang mempergunakannya, guna mendjamin supply dikemudian hari.

Salah satu industri yang dapat dibangun untuk keperluan diatas ialah pulp. Usaha yang telah ada kearah itu ialah projek Rayon Sumatra Selatan yang ditunjukkan untuk mengolah beberapa matjam jenis kayu yang berada dalam kompleks hutan Semangus. Kapasita pabriknya direntjanakan 150 ton rayon sehari, yang akan memerlukan lebih kurang 300.000 m³ kayu/tahun untuk keperluan pembuatan pulpnya sadja, belum terhitung kayu untuk keperluan lain.

Keadaan hutan Semangus sedikit banjak sudah diketahui. Mengenai komposisinya, disini terdapat kira² 200 jenis kayu daun, jaitu 45 jenis terpanjang kayu penting yang meliputi kira² 80% dari isi kayu seluruhnja, sedang yang 20% terdiri dari 155 jenis kayu yang tidak/belum mendapat lapangan penggunaannya. Isi kayunya setiap hektar adalah rata² 100 m³, jaitu dari isi pohon-pohon berdiameter 35 cm keatas. Djika pohon-pohon itu djuga akan ditebang, maka tidak akan lebih dari 120m³/ha dapat dipergunakan untuk keperluan pembuatan pulp, sedang yang lainnya termasuk jenis² kayu perdagangan perlu disediakan untuk keperluan pertukangan untuk keperluan

ini akan mengakibatkan adanya eksploitasi setjara besar²an. Perombakan itu akan meliputi luas se-kurang²nja 2.000 ha setiap tahun. Disamping keadaan hutannya, tjara² eksploitasi merupakan salah satu faktor pula jg. menjadi dasar untuk membangun suatu industri pulp sebesar itu. Suatu eksploitasi setjara besar²an yang khusus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dari sesuatu industri pulp yang dapat mengolah segala matjam kayu yang terdapat di hutan² daerah tropik pada kenjataanja hingga ini belum dilakukan orang. Tjara² eksploitasi daerah² sedang tidak dapat dijalankan begitu saja di hutan² daerah tropik. Penebangan dan transportasi dari pohon² yang biasanya berdiameter besar memerlukan alat² mekanis yang berat dan jalan² angkutan yang baik serta disesuaikan dengan keadaan hutannya, sedang sungai² sebagai jalan angkutan mungkin sukar dapat dipergunakan.

Pabrik, yang sebaiknya dibangun didekat hutan yang biasanya terletak djauh dari tempat² ramai, dengan sendirinja harus dapat memenuhi kebutuhanja sendiri akan tenaga, bahan bakar, bahan kimia, dsb. Selain dari pada itu perlu pula diingat, bahwa harus djuga dibangun suatu masyarakat tersendiri, tidak saja untuk keperluan pabrik, pengangkutan dan eksploitasi, akan tetapi djuga guna mengadakan penanaman² hutan kembali, suatu hal yang memerlukan usaha transmigrasi tersendiri.

Perlu ditambahkan, bahwa masalah tjara² pemadajaan (penanaman buatan atau alam) dan djenis² kayu apakah yang biasa tumbuh di-hutan² itu dapat dan perlu dipertahankan untuk keperluan supply dikemudian hari, merupakan persoalan yang tidak segera dapat terpetjahkan akan meminta waktu yang agak lama. Lain halnya djika menanam satu atau dua djenis kayu yang mudah dan biasa ditanam setjara biasa, misalnja Pinus ataupun Eucalyptus yang telah ternjata baik untuk pembuatan pulp. Pemenggunaan industri pulp yang didasarkan atas faktor² teknis dan ekonomis yang tidak begitu diketahui sedikit banjak akan membawa risiko yang tidak dapat dielakkan.

PEMASAKAN TJAMPURAN DARI DJENIS² KAJUDAUN HUTAN ALAM

Proses pengolahan kayu merupakan suatu dasar yang guna terlaksanaja pembangunan suatu industri pulp. Proses yang dipakai harus diselenggarakan dengan keadaan bahan mentahnya, jaitu djenis² kayu apakah yang dipergunakan, sedang sil pulpnya pun harus sesuai dengan barang yang di inginkan.

Menilik akan bahan bakunya, jaitu djenis² kayu daun tjampuran dari hutan² alam, dan berdasarkan atas pengalaman dari pertjobaan² laboratorium maupun setjara besar²an dari pelbagai djenis kayu daun dari daerah² tropik, maka proses yang terbaik guna mengolah djenis² kajudaun tjampuran sekaligus untuk pembuatan pulp ialah

sulfat atau soda-belerang. Proses ini sesuai pula bagi Indonesia, djika diingat bahwa belerang banjak terdapat disini, hanya belum diusahakan setjara besar²an, sedang soda kostik dapat dibuat dalam negeri dan atau dibikin sendiri oleh pabrik pulp dengan djalan electrolisa.

Kebaikannya proses sulfat ini ialah, karena dapat menghantjurkan sisa² kulit yang masih melekat padakayu yang diolah, disamping melarutkan extractives yang terdapat didalamnya, sedang sembarangan djenis kayu dapat dimasak dengan djalan ini. Keuntungan lainnja ialah, bahwa hasil pulpnya untuk pembikin kertas adalah lebih kuat dan djuga lebih banjak matjamnya barang djadi yang dapat dibikin, dibandingkan dengan proses² lainnja yang lazim dipergunakan.

Dalam prakteknja, pengolahan djenis² kayu untuk pembuatan pulp biasanya dilakukan satu atau djika ditjampur hanya dengan dua atau tiga djenis saja yang sifat²nja hampir sama, terutama sifat kimianja.

Telah dikatakan, bahwa djenis² kayu daun yang terdapat didaerah-daerah tropik, seperti halnya dinegara kita, sangatlah berlainan sifat²nja, baik physis maupun chemis. Ada yang sangat ringan atau sangat berat, ada pula yang sangat sukar dibuat chips karena amat kerasnja atau mengandung silikat yang agak banjak. Pengalaman² dalam penggergajian dapat membuktikan hal ini dengan tjepat tumpulnja gergadji, bahkan merusaknja. Di ladang² pun dapat kita lihat adanya pohon² besar yang masih berdiri ditinggalkan tidak ditebang. Berbagai-bagai djenis ada yang mengandung banjak getah atau damar atau extractives lainnja, yang mungkin dapat memperlambat djalannya pemasakan atau sangat banjak memerlukan bahan kimia untuk mengolahnja. Ada pula djenis² kayu yang karena mempunjai sifat² tertentu menghasilkan pulp yang sangat sedikit djumlahnja atau yang sifat-sifat kekuatan pulpnya rendah. Dari pertjobaan² mengenai pengolahan djenis² kayu daun setjara tjampuran ini banjak persoalan² teknis telah dapat terpetjahkan, akan tetapi kemungkinan² teknis ini belum berarti bahwa pelaksanaannya setjara praktis dapat dipertanggung-djawabkan. Bagi djenis² kayu-daun dan hutan² alam kita perlu diadakan pertjobaan², terutama pengolahan setjara tjampuran dari beberapa banjak djenis menurut komposisi yang terdapat dalam hutannya. Komposisi dari tjampuran djenis² kayu ini amatlah penting artinja bagi pengolahan guna memperoleh kwalitas pulp yang uniform.

Komposisi rata²nja dalam hutan dapat ditentukan dengan djalan mengadakan inventarisasi sebelumnya. Walaupun pertjobaan² setjara besar²an untuk mengolah djenis² kajudaun menurut komposisi yang telah ditentukan itu memberikan hasil yang memuaskan, akan tetapi apakah pabrik pulp yang didirikan atas dasar itu kemudian djuga menghasilkan pulp yang sama kwalitasnja

dengan hasil²nja pertjobaan tadinja masih merupakan problim jang perlu dipetjahkan dalam praktek.

Hal ini disebabkan karena komposisinja pada setiap pemasakan tidak akan selalu sama perbandingannya. Mempertahankan komposisi tjampuran jang konstan agar kwalitas hasil pulpnya tetap sama adalah sukar, lebih² djika djenis² kajunja agak banjak djumlahnja. Mungkin dapat tertjapai dengan djalan pemilihan djenis² kajunja pada beberapa tempat diluar sebelum didjadikan chips (serpih — sepertinja ditempat penebangan, ditempat penimbunan, ditempat penimbangan — sehingga pentjampuran dengan perbandingan jang telah ditentukan itu dapat dilakukan pada waktu chips akan dimasukkan kedalam tempat pemasakan. Tjara demikian dengan sendirinja menghendaki banjak pengalaman, buruh, tempat² pengumpulan guna memisahkan djenis² kajunja, pemeriksaan jang teliti, dsb. jang kesemuanja ini akan mengakibatkan tingginja biaja produksi dari hasil pulpnya. Dengan demikian, suatu pabrik jang mengolah bahan baku sematjam itu akan menelan biaja, baik biaja tetap mupun langsung, jang lebih tinggi daripada suatu pabrik jang bekerdja dengan bahan baku jang biasa dipergunakan dan terdiri atas satu atau dua djenis kaju sadja. Terketjuali djika harga kajunja sangat rendah, hal mana ketjil kemungkinannja mengingat perlu dadakannya klasifikasi dan pemilihan itu.

Pada kenjataanja, sampai saat ini dilain-lain negara belum ada didirikan sesuatu pabrik pulp jang bekerdja atas dasar pengolahan tjampuran dari berbagai djenis kajudaun jang agak banjak djumlahnja, lebih² djenis-djenis kajudaun tjampuran dari daerah² tropik.

Pembangunan suatu pabrik pulp/rayon jang didasarkan atas landasan demikian akan merupakan suatu usaha pionir. Walaupun demikian, hal ini tidak perlu merupakan suatu penghambatan dalam usaha kita untuk mendirikan pabrik rayon dinegara kita.

Pada taraf pertama untuk pembuatan pulp rayon hendaknja dipertimbangkan penggunaan djenis² kaju lain, jang banjak terdapat disini dan jang kwalitasnja uniform serta tidak akan menimbulkan problim² tehnik seperti diuraikan diatas. Dalam hal ini ditudjukan kepada penggunaan Pinus merkusii. Disamping itu dapat pula dipakai Agathis loranthifolia, sedang Eucalyptus hendaknja dipertimbangkan penanamannja jang luas, karena tumbuh tjepat dan diluar negeri salah satu djenis dari padanja sudah banjak dipergunakan dengan sukses.

Pihak Kehutanan sudah sedjak lama memberikan sumbangan jang tidak sedikit dalam mengusahakan adanja persediaan bahan baku berupa kaju, jaitu mengadakan penanaman² hutan setjara besar²an dari berbagai djenis kaju, antara lain Pinus merkusii, Agathis loranthifolia, Albizia falcata, dsb. jang tjepat tumbuhnja, dibeban rata wilajah hutan untuk keperluan industri jang mempergunakan kaju sebagai bahan bakunya. Khusus untuk keperluan industri pulp, jang semula ditudjukan untuk pembuatan kertas, pada waktu sekarang telah terdapat tanaman² jang luasnja sudah tjukup untuk dapat diusahakan jaitu Sumatera Utara (Toba), Djawa Barat dan Djawa Tengah.

Tjita² selfsuporting akan terwujud, bilamana hutan-hutan kita benar² diusahakan setjara berentjana dan teratur. * * *

GARTHAYON

Pada satu hari, satu minggu jl. datang menghadap pada saja Ir. Gardjito. Apakah ada disini? Ja itu dia, Pak sini. Pagi-pagi saja sedang minum kopi Saudara-saudara, klujur Saudara Gardjito datang. Saja katakan: Ada apa? Pak saja telah berhasil. Berhasil apa? Membuat tekstil. Mana? Ini Pak. Dia membawa dua gulung tekstil bagus sekali. Kau bikin dari apa? Pak, kita ini kan banjak pohon karet, pohon karet jang tua itu kita tebang supaja diganti dengan pohon karet jang ketjil, jang muda, namanya peremadjaan kebon karet ini. Pohon karet tua jang kita tebang biasanja didjadikan kaju bakar sadja. Dari kaju karet ini dia mengadakan research. Tidak tahu apa jang dia perbuat, digodog, dibakar, pendeknja diolah begini, olah begitu, nah djadi tekstil jang bagus sekali.

Lantas saja berkata: Gardjito, usahakan agar supaja tekstil jang berasal dari pohon

karet ini nanti bisa mendjadi tekstil jang dipakai oleh seluruh bangsa Indonesia. Sebab bahannja murah. Pohon karet jang sudah tua, jang dibuang, dari pada dibuang sebagai kaju-bakar Gardjito membuat tekstil dari padanja.

Malah saja pikir-pikir, saja kasi nama apa ini tekstil. Sekarang sedang ditukang pendjahit, dipotongkan badju buat Bapak dari bahan ini. Jang datang pada saja itu Ir. Gardjito, Menterinja Hadi Thajeb. Gar dan Tha, djadi saja kasih nama tekstil baru ini bikinan Gardjito dan Thajeb "Garthayon".

Djadi namanja "Garthayon". Mengapa yon? Biasanja dikasi yon: Chiffon, Nylon, Sinalon, Dekron, on — on — on. Ini saja kasi nama "Garthayon".

Dari amanat P.J.M. Presiden/Pemimpin Besar Revolusi pada pembukaan Mubesan-I tgl. 16-9-1965 di Istana Olahraga Senajan, Djakarta.

PRODUSEN

EKSPORTIR

Dalam amanat politik P.J.M. Presiden/Pemimpin Revolusi/Mandataris M.P.R.S. pada Sidang Umum M.P.R.S. ke III tanggal 11 April 1965 yang berjudul "ERDIKARI", mengenai pasal Ekonomi Perjuangan diuraikan :

Para pengusaha Swasta dilarang untuk melakukan ekspor, kecuali jika mereka mengimpor atas nama Pemerintah. Kepada Swasta² itu hanya diberikan izin untuk berusaha menjadi PRODUSEN-EKSPORTIR yang ekspor harus dilakukan dibawah pimpinan Pemerintah. Hal ini merupakan tugas-Revolusi yang dibebankan kepada pengusaha Swasta sebagai salah satu unsur-mutlak dalam Ekonomi Sosialis Indonesia.

Swasta harus mengerahkan segala dana dan tenaga untuk meningkatkan ekspor kita ini. Dan kepada Bamunas Departemen Penertiban Bank dan Modal Swasta diarahkan untuk menyesuaikan kebijaksanaan dan kebijaksanaan dengan garis-strategi serta taktik Program Perjuangan kita itu".

Mulai tanggal 1 Djanuari 1966 izin ekspor diberikan kepada Swasta, yang telah terdaftar sebagai produsen-eksportir. Dalam waktu beberapa bulan sebelum tanggal 1 Djanuari 1966, diharapkan agar para importir-eksportir Swasta berusaha menjadi eksportir-produksen, baik itu melalui memiliki perkebunan dan/atau unsur up-grading, ataupun setjara afiliasi (masuk andil) dalam sektor-produksi dan/atau unsur² upgrading hasil² bumi.

3. Ketentuan mengenai eksportir-produksen dimaksudkan akan mencakup hasil² bumi ekspor rakjat yang penting², seperti : karet, kopi, lada, tembakau, cassia vera, pala/fuli, kopra, rotan, damar dsbnja.

4. Istilah eksportir-produksen, sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Urusan Bank Sentral/Pimpinan LAAPLN No. 653/M/SKB/63 tanggal 11 Nopember 1963 mentjukupi:

- a. perusahaan² yang menghasilkan, mengolah dan mensortir menjadi mutu-ekspor dan mengekspor sendiri hasilnja;
- b. perusahaan² yang membeli/mengumpulkan hasil², mengolah dan mensortirnya menjadi mutu ekspor dan mengekspor sendiri hasilnja;
- c. perusahaan² sortasi/upgrading/packing yang mengekspor sendiri hasilnja;
- d. eksportir² biasa, yang mempunyai andil dalam perusahaan² remilling atau rumahasap, atau packing atau upgrading atau industri dan mengekspor sendiri hasil² perusahaan yang disertainja itu.

5. Oleh karena masing² daerah mempunyai hasil² ekspor yang tersendiri dan berlainan dengan daerah² lain, maka diserahkan kepada kebijaksanaan Perwakilan Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri di Daerah untuk menetapkan prioritas dalam jenis hasil² bumi yang dapat diekspor oleh Swasta.

PENDIRIAN PERUSAHAAN² NEGARA JANG BARU DIBIDANG PERDAGANGAN

Perhubung masih adanja berbagai aktivitas perdagangan dari bekas Perusahaan Dagang yang belum tertampung, maka dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1965, telah diizinkan :

P.N. Sapta Motor : tersusun dari Divisi VII bekas P.N. Tulus Bhakti ;

P.N. Karya Tjotas : tersusun dari Divisi Produksi bekas P.N. Fadjar Bhakti ;

P.N. Fadjar Ternak : tersusun dari Cattle Project bekas P.N. Fadjar Bhakti ;

P.N. Mega Electro : tersusun dari Divisi III Electro Teknik bekas P.N. Tulus Bhakti ;

P.N. Pengolahan Tjat Dan Pernis Pabrik Tjat "UTAMA" : tersusun dari Pabrik Pengolahan dan Pabrik Tjat bekas P.N. Tulus Bhakti ;

P.N. Permata Nusantara : tersusun dari semua toko buku dan sebuah pertjetakan di Bandung bekas P.N. Fadjar Bhakti ;

Perusahaan² Negara tersebut merupakan alat yang lebih mendekatkan pada maksud pemerintah mentjapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan azas² Dekon dalam bidang perdagangan

Lapangan usaha dari Perusahaan² Negara tersebut adalah :

1. P.N. Sapta Motor : Perdagangan dan Perbengkelan kendaraan bermotor;
2. P.N. Karya Tjotas : Perdagangan/Pengolahan kertas dan tjoklat.
3. P.N. Fadjar Ternak : a. Perdagangan hewan ternak besar/ketjil, ternak unggas dan hasil-hasil hewan untuk diekspor, antar pulau dan lokal; b. Usaha-usaha lainnja yang berhubungan dengan huruf a.
4. P.N. Mega Electro : Melakukan perdagangan mesin-mesin alat-alat/bahan-bahan teknik, barang-barang/bahan-bahan electro tehnik dan semua barang yang berhubungan dengan ini ;
5. P.N. Permata Nusantara : Perdagangan lektur dalam dan luar negeri dan usaha-usaha yang berhubungan dengan ini.
6. P.N. Pengolahan Tjat dan Pernis Pabrik Tjat "UTAMA" : Pengolahan dan Perdagangan Tjat dan Pernis dalam arti seluas-luasnja ;

Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1965 ini ditetapkan di Djakarta pada tanggal 20 September 1965



Adjaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno

v.

Dubbele Les?

Dibawah kepala "Dubbele Les" maka kita membatja dalam "De Indische Courant" tanggal 12 Januari pemandangan-pemandangan dibawah ini:

"Ter bestrijding van de actie der zogenaamde 'Indonesische' nationalistes is den laatsten tijd nog al eens gewezen op het agglomeraat van volksgroepen met verschillend ontwikkelingspeil, dat "uitsluitend en alleen door ons Nederlandsch bestuur wordt tezamen gebonden en gehouden als de bevolking van Nederlandsch-Indië". Er kan daarom — zoo wordt gezegd — niet gesproken worden van een Indonesisch volk in onzen archipel en zelfs niet van eenig saamhoorigheidsgevoel onzer Inlandsche bevolking wordt dan als een specifiek Nederlandsch-Indisch verschijnsel opgevat.

Vergeeten wordt, dat dezelfde opmerking aangaande verschil van stam, godsdienst, zeden en gewoonten, tongval en ontwikkelingspeil kan gelden voor tientallen andere volken der wereld welke desniettemin als nationale eenheden worden erkend. Ter nietiging van de voormalige centrale mogendheden van Europa heeft men bij den vrede van Versailles eenige volken-agglomeraten van dezen aard ontbonden onder de leuze van het recht op eigen lotsbestemming, toekomstige aan elke nationale groep, terwijl men thans die ontbinding betreurt. Terzelfdertijd voegde men weder nieuwe eigegeaarde volksgroepen bijeen in de overtuiging, dat deze zeer best een "natie" zouden kunnen vormen.

Met het saamhoorigheidsgevoel van bevolkingsgroepen en het begrip nationale eenheid wordt omgesprongen naar politiek believen van het oogenblik. In 't eene geval sluit men oogen en ooren voor de eenige waarheid dat het begrip "natie" een politiek-historisch begrip is, in't andere geval houdt men er zich van overtuigd, dat de staatkundige en economische samenvoeging van volksgroepen, vanzelve, als 't ware automatisch, binnen korten of langen tijd een nationale eenheid s c h e p t.

Het Indische agglomeraat van volken best bovendien, althans in hoofdzaak, uit enkelvoudige welke, elk voor zich, eenige millioenen ziele tellen. Wij, Europeanen, daarentegen zijn nazaten van volkstammen en volksfamilliën, welk ten tijde der groete volksverhuizing ontstonden aan de buitenranden der antieke wereldbeschaving, waardoor het werelddeel Europa een agglomeraat van duizenden volksgroepen werd. Zoo verschiedden en desniettemin zoo door en over elkander geworpen, dat een anthropologische wirwar die van Europa in een zoodanig klein bescheiden gebied nergens elders ter wereld te vinden is.

In ons eigen vaderland is eenigen tijd geleidelijk opnieuw de aandacht gevestigd op het agglomeraat van volksgroepen, dat gezamenlijk uitmaakt de Nederlandsche natie, welker innig saamhoorigheidsgevoel door geen sterveling kan worden betwijfeld. De Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam besloot indertijd tot het instellen van een systematisch onderzoek naar de anthropologische bestanddeelen van het Nederlandsche volk, tellende gezamenlijk 7 millioen personen. Reeds van te voren voorspeld, bleven de verrassende resultaten omtrent de vele verscheidenheden in afkomst, geaardheid, tongval, zeden, gebruiken en ontwikkelingspeil.

Ons kennis der anthropologische samenstelling van de Nederlandsche bevolking is nog zeer onvolledig, doch dit staat toch wel reeds vast, dat Europa nauwelijks een tweede land is aan te wijzen, dat bij zoo geringe uitgebreidheid zulk een verscheidenheid bezit in de anthropologische elementen zijner bevolking.

De verschillende gesteldheid van onzen bodem, de verbrokkeling van ons land in door natuurlijke grenzen afgebakende gedeelten heeft het onmogelijk gemaakt van zee gelocaliseerde typen in de hand te geven, zoodat ons volk tot een anthropologisch ingewikkeld complex is geworden. Daarvan weten wij nog veel te weinig, en kennis daarvan is toch zeer zeker van groote beteekenis voor onze opvatting over de historische

ling van ons volk en voor het begrijpen van de volksziel en den volksaard der bewoners van de verschillende deelen van Nederland.

Nadat ten onzent brachycephalen en dolychcephalen, Franken, Kelten, Saksers eerst eenige eeuwen lang met elkander overhoop gelegen en weinig saamhoorigheidsgevoel te zien gegeven hadden, legde tenslotte de staatkundige daad der Unie van Utrecht den grondslag voor de Nederlandsche nationaliteit. En wij, die door ons bestuur in Indië het "eenige cement zijn, dat de verschillende volken van Indië met elkander verbindt", bewerken juist in die functie nolens volens hetzelfde proces, maar op grootscherschaal. Bedenken we nu, dat het cement van ons Nederlandsch bestuur in vier vijfden van den geheelen Archipel, namelijk in negen tienden van alle uitengewesten, gezamenlijk nog niet langer dan oogstens 25 jaren werkzaam is geweest, dan moet erkend worden, dat dit proces zich zeer snel voltrekt. Pogingen als die van Ritsema van Eckmer door middel van een federalistisch bestuursstelsel, naal en perk te stellen, zullen niet baten. Ook Nederland zal de consequenties van zijn bestuur over dit agglomeraat van volken hebben te aanvaarden. Er is geen ontkomen aan.

Wat hier, onder den dwingende invloed en de niet te breidelen kracht van een uitheemsch bestuur, gebeurt, is trouwens geen unicum. Het is een cultuur-historisch verschijnsel, dat zich telkens weer opnieuw herhaalt. In de wereld-historie zijn ontzaglijke natiën even snel ontstaan als weder uiteengevallen onder den invloed van bepaalde staatkundige gebeurtenissen. Ook op koloniaal gebied.

Nemen wij als voorbeeld: Mexico. Bij den aanvang van hun kolonisatie in dat land, vonden de Spanjaarden er meer dan honderd verschillende stammen van elkander zeer verscheiden volksgroepen. Door hunne invasie en hunne bloedmenging met de Inheemschen voegden zij er nog een paar groepen bij. Op 't oogenblik bestaat het Mexicaansche volk, tellende 14 millioen zielen, voor 19 procent uit blanken, voor 38 procent uit Indianen en voor 43 procent uit Mestiezen. En wat nu de autochtone bevolking betreft, de Roodhuiden: in 1664 onderscheidde Don Manuel Orozco Y Berre onder hen: Azteken, Zapateken, Yacateken, Tolteken, Othomi, Totoni, Tarasci, Apachen, Matlangi, Chontali, Mixi, Zoqui, Guaicuri, Apatapima, Copalapa, Seri, Huaarri enz. enz. Hii teekende 51 talen op, met 96 verschillende dialecten en 62 verschillende idiomen, tezamen 182 tongvallen, elk een afzonderlijk volksgroep aanduidende.

Tot het midden der 19e eeuw vertoonde dit merkwaardig agglomeraat van volksgroepen bijzonder weinig saamhoorigheidsgevoel. Integendeel was het land een constant tooneel van, wat wij nu noemen: dessaoorlogen. In 1866, met het optreden van Benito Juarez als president, ontstond het Mexicaansche saamhoorigheidsgevoel,

dat tijdens het langdurig bewind van den Indiaan Profirio Diaz het materiaal tot de vestiging van de Mexicaansche eenheid leverde.

Maar hetzelfde Mexico brengt nog een andere les dan die betreffende het stereotiepe historisch proces. In 't begin der vorige eeuw heeft het zich losgemaakt van den Europeeschen "overheerscher" en moest onvoorbereid, met zijn agglomeraat van volksgroepen, verder geheel op eigen beenen staan. De nationale eenheid is tot staan gekomen — er is IS een Mexicaansch volk — maar van rust en orde is geen sprake. Het land wordt periodiek overgeleverd aan de grillen en wreedheden van stroopende en muitende "generaals". Had Mexico in zijn wordingsjaren het voorrecht genoten van een wijze Westerliche leiding, dan zouden land en volk er thans heel anders voor staan.

Mexico — en trouwens zoovele andere landen — moge den bespotter van de "Indonesische" eenheid tot bedachtzaamheid manen en meer aandacht aan de historie doen schenken, het dient zich ook aan als een ernstige waarschuwing voor die "Indonesische" nationalist, die thans reeds hardop droomen van vrijheid en onafhankelijkheid. Zoo de Westerling zich thans de leiding hier liet ontglijpen, dan zouden die "vrijheid" en "onafhankelijkheid" niet veel verschillen van wat er in Mexico onder verstaan wordt.

En dat is waarlijk niet veel bijzonders!

Laat de Indische bevolking terdege beseffen, dat onder Westersche leiding vrede, welvaart en orde haar deel zijn, en dat de chaos, de terreur en de voortdurende onderlinge strijd er voor in de plaats zouden treden, zoo de extremistische nationalist in staat waren om hun doel te bereiken.

Maar laten anderziids de Westerlingen zich bewust zijn van het feit, dat het Nederlandsche bestuur over deze landen de voltrekking van het historisch proces der nationale bewustwording stimuleert en verhaast.

Niet voor niets spraken wij dan ook van een dubbele les!"

Begitulah pemandangan-pemandangan "Ind Cr." itu. Maksudnja ialah untuk menundjukkan pada pembatja-pembatjanja, bahwa faham "persatuan bangsa", sebagai jang dipeluk dan diusahakan oleh kita, kaum nasionalis Indonesia, sama sekali bukanlah faham jang mustahil atau faham jang kosong, melainkan ialah suatu faham jang oleh riwayat dunia telah dibuktikan kebenarannya dan terdjadinja, suatu kenjataan jang sudah njata,- tetapi....., bahwa salah sekalilah adanja, djika kita, kaum nasionalis Indonesia, ingin akan perginja pemerintahan asing dari negeri tumpah darah kita ini: artinja, bahwa tjelaka sekalilah kita nantinja, djika kita melepaskan diri dari pada "pimpinan" bangsa Eropah itu, sebagaimana sudah terbukti dengan senjata-njatanja di Mexico, dimana keadaan men

djadi katjau dan kalut, sesudah "pimpinan" Eropah disana diberhentikan. Keadaan Mexico jang katjau itu dipakailah oleh "Ind. Crt." untuk memberi alasan pada peringatannya, djanganlah kita ingin menghentikan "pimpinan" Eropah itu, djanganlah kita ingin berdiri sendiri, djanganlah kita ingin m e r d e k a.

Djawab kita atas peringatan dan adjaran ini bolehlah kita bikin singkat.

Mexico mendjadi kalut sesudahnja "pimpinan" Eropah diberhentikan. Baik. Tetapi lupakah "Ind Crt.", bahwa Mexico itu, sebelum orang Eropah datang disitu, sebelum orang Sepanyol mengindjaknja, ada suatu negeri jang teratur, suatu negeri jang aman, suatu negeri jang besar dan kuat? Lupakah "Ind. Crt.", bahwa kekalutan dan ketakjauan Mexico itu terdjadinja ialah sesudahnja orang Eropah datang disitu, sesudahnja negeri itu mendjadi tempat pentjaharian rezeki bangsa kulit putih? Lupakah "Ind. Crt.", akan amannya, teraturnja, besarnja negeri Mexico itu didalam abad kelimabelas dan didalam permulaannya abad keenambelas dan didalam sebelumnja bangsa Eropah datang, — besarnja negeri Mexico dibawah pimpinannya radja Montezuma, tatkala batas-batasnja ada terletak dari Texas sampai Panama, dari tepi pantai teluk Mexico sampai tepi pantai lautan Pasifik, — dan mendjadi kalut dan katjaunya negeri itu sesudah orang Eropah mendjatuhkan djangkar perahunja di Vera-Cruz dalam tahun 1519 kalutnja negeri itu dari zaman kekedjamannya Hernando Cortez, jang melumur-lumuri ia punja "marilah kita mengikut-silang (kruis), sebab dalam tanda itulah kita akan menang" dengan darahnja rakjat Mexico, — sampai pada zaman kekedjaman jang achir-achir?

Mexico sama sekali tidak kenal akan tenteram dan keadaan teratur dibawah "pimpinan Eropah". Mexico senantiasa kusut-samut.

Bahwasanja : tipislah kebenarannya kata ketenteraman dan kata kesedjahteraan jang "pimpinan" Eropah itu datangkan di Mexico, bilamana kita ingat akan tak henti-hentinja perlawanan penduduk Mexico terhadap pada fihak jang "memimpinnya" itu, dan bilamana kita misalnja ingat akan halnja penduduk Mexico menangkap dan menghukum mati kaisar Maximilian, kaisar bangsa Eropah, jang "memimpin" dan memerintah negeri Mexico itu tjara Eropah pula. Tipis pula kepertjajaan kita akan unggulnja, akan superioritetnja pimpinan Eropah itu dalam umumnya, dimana Eropah sendiri tiada habis-habisnja mendjadi medan revolusi agama, revolusi nasional, revolusi proletar dan revolusi lain-lain, — tiada habis-habisnja mendjadi medan kekalutan, ketakjauan dan peperangan negeri, sebagai misalnja jang kita alami dalam tahun 1914-1918, tatkala Eropah itu seolah-olah suatu heksenketel dan hampir-hampir kiamat oleh mengamuknja api peperangan tebe-:

Dimana bangsa Eropah menduduki salah suatu negeri Asia untuk "memberi pimpinan", disitulah kelihatannya lantas datang "orde", akan tetapi orde ini sebetulnja ialah tidak lebih dan tidak kurang dari pada schijn-orde adanja. Sebab orde jang sedjati-djatinja orde ialah keadaan teratur, jang hanja bisa terdapat bilamana antara fihak jang memerintah dan fihak jang diperintah ada persetudjuan satu sama lain, tegasnja : bila mana antara dua fihak itu ada harmoni jang sedalam-dalamnja. Dan tidak begitulah keadaannya dalam negeri-negeri Asia jang diduduki bangsa Eropah itu untuk "dipimpin". Tiap-tiap kemauan rakjat jang menjimpang dan tak sesuai dengan kemauan bangsa Eropah jang mendjadjakkannya tiap-tiap usaha rakjat itu mematangkan diri dari pada "pimpinan" itu, didjawabnjalah dengan aturan-aturan jang keras. Aturan-aturan jang keras inilah jang lantas mendatangkan "orde" aturan-aturan jang keras inilah jang mendatangkan "keadaan teratur" dan "ketenteraman". Tetapi bagi siapa jang mau mengerti, maka teranglah dengan seterang-terangnya bahwa "orde" jang demikian ini ialah schijn-orde jang sebenarnya. Bagi siapa jang mau mengerti, maka njatalah, bahwa "orde" jang demikian ini sebenarnya ialah orde jang bosok.

Djadjaran tiang-tiang penggantungan djugalah orde; tetapi orde jang begini ialah "orde tiang penggantungan" "Permanent wanorde is ook orde", begitulah seorang achil filsafat berkata. Ia ada dalam kebenaran. Ia tak salah, sebagaimana tak salah pula perkataannya Galbaud terhadap pada Hertog van Brunswij jang dengan keras mengadakan peraturan-peraturan "orde" dalam negerinja, bahwa "orde" jang diadakan oleh orang asing jang menduduki negerinja itu sebenarnya ialah perbudakan; — bahwa "orde" jang demikian itu sebenarnya ialah slavernij, esclavage.

Bahwasanja : Slavernij djugalah suatu mata tjam orde, slavernij djugalah suatu keadaan rusul slavernij djugalah suatu keadaan teratur. Tetapi persetudjuan dan harmoni disitu tidak ada dan orde jang demikian ialah orde jang bosok karenanja.

Dengan keterangan-keterangan kita diatas ini maka "orde" jang diadakan oleh bangsa Inggris di Mesir atau di India, "orde" jang diadakan oleh bangsa Perantjis di Indo-China, "orde" jang diadakan oleh bangsa Amerika di Philipina. — umumnya "orde" jang diadakan oleh bangsa kulit putih didalam negeri-negeri Asia jang diduduki dan diambil rezekinja, — tampaklah dalam rupanja jang palsu. "Orde" jang didesakkan dalam negeri Asia itu pada hakekatnja ialah "orde" jang dimaksudkan oleh Galboud tahadi : "Orde" jang tak bersendi pada persetudjuan antara fihak jang memerintah dan fihak jang diperintah : "orde" jang dipaksakan terdjadinja dengan aturan-aturan jang keras; "orde" paksaan, "orde" perbudakan.

(Bersambung ke hlm 34)

REPUBLIK GUINEA

konsekuensi anti-nekolim bersikap positif terhadap K.A.A.-II jad.

GUINEA adalah sebuah republik yang letaknya di Afrika Barat dengan wilayah seluas 246.000 kilometer persegi dan jumlah penduduk sebanyak 150.000 jiwa. Guinea memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 2 Oktober 1958 dengan Presiden Ahmad Sekou Toure sebagai Kepala Negara. Ibukota Guinea adalah Conakry.

Pada waktu Presiden Perantjis, Djendral de Gaulle, mengadakan kunjungan ke negara² Afrika dalam tahun 1958 untuk menjaksikan referendum dalam rangka penentuan tiorak pemerintahan bagi negara² bekas djadjahan Perantjis di Afrika, maka Guinea merupakan satu²nja dari 8 negara bekas djadjahan Perantjis yang memberikan suara "menolak" untuk hidup dalam African Community. De Gaulle waktu itu mengatakan, bahwa negara² yang tergabung dalam African Community akan diberikan hak untuk memerintah sendiri, ketjuali mengenai masalah² yang berhubungan dengan pertahanan, luarnegeri dan keuangan yang akan ditentukan oleh Federal Community. Sekou Toure, pemimpin rakjat Guinea yang waktu itu berusia 36 tahun, tidak menal kompromi dengan pendjadjah Perantjis atas usul de Gaulle tsb., ia mengatakan: Guinea lebih suka hidup dalam kemelaratan, tetapi merdeka daripada hidup dalam kemewahan tapi diperbudak orang lain". Demikianlah, maka Guinea memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 2 Oktober 1958. Negeranya berbentuk republik dengan sistim pemerintahan presidensiil.

Pemerintah Perantjis yang merasa mendongkol atas tindakan dari Guinea itu bermaksud membandam pada Guinea. Mereka segera memertahankan untuk menarik semua tenaga² ahli Perantjis yang bertugas di Guinea. Semua perlengkapan Perantjis yang ada di Guinea ditarik kembali, demikian pula kapal² Perantjis yang waktu itu berada dipelabuhan² Guinea untuk supply bahan² makanan dan perlengkapan² lainnya bagi Guinea dialihkan ketempat lain.

Pada waktu ditinggalkan Perantjis, Guinea berada dalam keadaan sulit sekali. Rakjat miskin karena sebagian besar dari negara itu terdiri dari pagaspasir dan hutan. Perantjis sedikit sekali telah berbuat dalam bidang pendidikan.

Tindakan Perantjis tsb. diatas mempertebal tekad Guinea untuk berdikari dan dengan segera memasionalisir semua perusahaan² asing yang ada di Guinea. Kini Guinea ber-angsur² menemukkan kemajuan, terutama dalam lapangan industri, pertanian, pendidikan, sosial dll.

Sistim Demokrasi Sentralisme di Guinea.

Mengenai Hukum Tatanegara yang berlaku di Guinea, dapat dikatakan, bahwa nampaknya setjara formil diadakan pembagian kekuasaan menurut trias politica, tetapi sesuai dengan sistim satu partai yang dianut, pada hakekatnya seluruh kekuasaan di Guinea berada ditangan Partai Democratique de Guine (PDG). Ini adalah sesuai dengan situasi dan kondisi Guinea sebagai negara yang bertjita² untuk mendirikan masyarakat sosialis. Sistim satu partai ini djuga dianut negara² Afrika lainnya yang progresif seperti Ghana, Mali dll.

Kekuasaan politik sehari² dijalankan oleh sebuah Bureau Politique Nasional dari PDG tsb. yang beranggautakan 15 orang. Majorita anggauta BPN ini adalah golongan kiri, termasuk Presiden Sekou Toure yang sekaligus mendjabat sebagai Sekretaris Djendral dari PDG. Golongan kanan merupakan minoritas yang ketjil. Golongan kiri yang dipimpin oleh Sekou Toure sendiri menguasai bidang militer, polisi, perekonomian dan politik luarnegeri. Demikian pula mereka mendapat dukungan yang kuat dari rakjat karena mengintegrasikan dirinja dengan rakjat dan mendapat kepertjajaan dari rakjat. Oleh karena itu, maka di Guinea dewasa ini tidak ada bahaya penggulingan kekuasaan terhadap Sekou Toure, seperti yang telah terdjadi dengan Ben Bella.

Pemuda²nja di Guinea tergabung dalam Jounesse du Rassemblement Democratique Africain (IRDA), yang wanitanja dalam Union des Femmes de Guinea (UFG).

Agama yang banjak penganutnja ialah Islam.

Politik Guinea anti-imperialisme.

Karena majorita Bureau Politique Nasional termasuk Presiden Sekou Toure adalah kiri, maka Guinea adalah konsekuensi anti-imperialis. Sikap Guinea terhadap O.C.A.M. (l'Organisation Commune d'Afrique et Malagache) yang merupakan organisasi dari kaum reaksioner Afrika dalam negara² bekas djadjahan Perantjis (sematjam negara² nekolim bentukan Afrika), adalah tegas. Dalam salah satu pidatonja yang baru lalu, Sekou Toure mengutuk dengan tegas, bahwa OCAM yang didalangi oleh imperialis adalah bertudjuan untuk mensabotir pekerdjaan O.A.U. (Organisation of African Unity), suatu organisasi yang dapat digunakan untuk mengakhiri dominasi imperialis di Afrika.

Politik luarnegeri Guinea pada umumnya tjongdong kekiri sedjak berdirinja terus-menerus berpegang pada politik jang progresif revolusioner. Kesadaran nasionalnja besar sekali dan ini terbukti dari pemutusan hubungannya dengan ikatan² Perantjis sedjak permulaan dari kemerdekaannya. Guinea konsekwen anti nekolim.

Dalam konperensi² Non-Aligned I dan II di Beograd dan Cairo dan dalam MMAA di Djakarta, Guinea mengirim team utusannya. Guinea menginginkan kerdjasama antara negara² Afrika untuk mentjapai persatuan dalam politik, ekonomi dan militer dari seluruh negara² Afrika jang merdeka dan berdaulat (Pan Afrikanisme). Guinea ada lah anggota dari Kelompok Casablanca dan djuga anggota dari OPA (Organisasi Persatuan Afrika), dan mentjita²kan satu UNI antara Ghana-Guinea dan Mali.

Mengutamakan bantuan dari Negara² Sosialis.

Seperti halnya dengan negara² jang sedang berkembang lainnya di Afrika, Guinea banjak sekali membutuhkan bantuan ekonomi. Dalam hal menerima bantuan ini, Guinea mengutamakan bantuan dari negara² sosialis. Tapi dalam pada itu Guinea — karena kebutuhan jang mendesak — djuga terpaksa menerima bantuan dari negara² imperialis, terutama dari Amerika Serikat dan Inggris.

Menjokong K.A.A. II di Aldjazair.

Semula sesudah didjatuhkannya Ben Bella, Republik Guinea mempunyai sikap bimbang terhadap penjelenggaraan Konperensi AA II di Aldjazair, karena Sekou Toure mempunyai hubungan pribadi jang erat dengan Ben Bella, maka ia sangat ketjewa dengan didjatuhkannya Ben Bella oleh Boumedienne.

Sampai² setjara resmi BPN dan dia sendiri mengeluarkan pernyataan keketjewaannya dihadapan rapat umum berhubung dengan digulingkannya Ben Bella. Tetapi setelah beberapa anggota dari Dewan Revolusi Aldjazair datang di Conakry untuk memberikan penjelasan mengenai situasi Aldjazair, maka pada dewasa ini Sekou Toure mempunyai pandangan lain dan Guinea mempunyai sikap jang positif terhadap Konperensi AA II jang hendak diselenggarakan di Aldjazair itu. Malahan kini, sekalipun ada usaha untuk menggagalkan atau memindahkan Konperensi AA II dari Aldjazair oleh beberapa negara Afrika, akan tetapi Pemerintah Republik Guinea mempunyai sikap menjokong sepenuhnya Konperensi AA II.

Republik Guinea bersikap bahwa pengunduran Konperensi O.A.U. tidak boleh mengganggu terselenggaranya Konperensi AA di Aldjazair pada waktu jang sudah ditentukan. Selanjutnja dikatakan oleh Sekou Toure, kalau toch Konperensi

O.A.U. terpaksa harus diundur, maka paling lambat pada pertengahan bulan Oktober, sehingga tidak mengganggu Konperensi AA II di Aldjazair.

Sikap Republik Guinea jang menjetudji sepenuhnya Konperensi AA ke-II di Aldjazair ini ternyata pula didalam pernyataan bersama Sekou Toure-Nasser jang dikeluarkan di Cairo dalam rangka kunjungan delegasi Republik Guinea ke R.P.A. pada permulaan Agustus jang baru lah

Tidak sokong ikutsertanja "Malaysia".

Mengenai ikutsertanja "Malaysia" dalam Konperensi AA II di Aldjazair, Pemerintah Guinea telah mempunyai sikap jang djelas jaitu tidak akan menjokong ikutsertanja "Malaysia" dalam Konperensi AA II di Aldjazair. Ini disebabkan karena djuga di Afrika neokolonialis merupakan problem jang harus dipetjahkan.

Mengenai prosedur dalam Konperensi AA II, Pemerintah Guinea setuju dengan prosedur diskusi dan konsultasi dan menolak prosedur pengumuman suara.

Mengenai masalah Vietnam, Pemerintah Guinea telah mengambil sikap jang djelas jaitu mendukung perdjangan rakyat Vietnam. Setjara dia Guinea mengakui kesalahannya dimasa lampau ikut menandatangani pernyataan 17 Negara non blok mengenai Vietnam.

Sikap Guinea inipun nampak djelas dalam pernyataan bersama Guinea Uni Sovjet dan Guinea Hongaria dalam kunjungan delegasi Guinea dipimpin sendiri oleh Sekou Toure ke kedua negara tsb. achir bulan Djuli jang lalu.

Menganggap Indonesia sebagai Kakak.

Terhadap Republik Indonesia, Pemerintah Guinea menaruh rasa simpati jang besar dan menganggap se-olah² Indonesia adalah kakaknya. Guinea selalu menaruh harapan, bahwa Republik Indonesia dapat memberi bantuan konkrit dalam menanggulangi kesulitan² ekonomi jang kini sedang didapinya.

Indonesia mengakui Guinea pada tanggal 10 Nopember 1958. Hubungan seterusnya adalah baik sekali, malah Presiden Sekou Toure adalah seorang sahabatkarib dari Presiden Sukarno. Keduanya mempunyai pandangan jang banjak samaannya (telah saling kunjung mengunjung setjara kenegaraan). Guinea menerima bantuan dari Indonesia, walupun belum terlaksana seluruhnya, seperti pengiriman ahli² bata, genteng keramik, bibit² kelapa sawit, kedele, padi, k dll.

Guinea adalah djuga anggota sponsor GANEFO, ikutserta dalam GANEFO I di Djakarta telah turut menghadiri Dasawarsa AA di Djakarta.

(Antara Spektrum)

PENGUMUMAN-PENGUMUMAN /VARIABERITA

DEPARTEMEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI /

URUSAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

1. Eksportir produsen.

Istilah **eksportir-produsen**, sebagaimana jang di tetapkan dalam surat keputusan bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Urusan Bank Sentral/Pimpinan LAAPLN No. 653/M/SKB/63 tanggal 11 Nopember 1963 diperluas, perumusannya sbb :

- a. perusahaan² jang menghasilkan, mengolah dan mensortir menjadi mutu ekspor dan meng-ekspor sendiri hasilnya;
- b. perusahaan² jang membeli/mengumpulkan hasil², mengolah dan mensortirnya menjadi mutu ekspor dan mengekspor sendiri hasil²nya;
- c. perusahaan sortasi/upgrading/packing jang mengekspor sendiri hasil²nya;
- d. eksportir² biasa, jang mempunyai andil dalam perusahaan² remilling atau rumah asap, atau packing atau upgrading atau industri dan mengekspor sendiri hasil² dari perusahaan jang disertainja itu.

2. Larangan investasi untuk pembangunan baru perusahaan² upgrading/sortasi lada, kopi dan remilling di Lampung.

Dalam rangka mendjamin kelantjaran dan perkembangan perusahaan² upgrading/sortasi lada, kopi dan remilling di Daerah Tingkat I Lampung perlu dihindarkan kontradiksi² antara kapabilitas produksi dan kapasitas perusahaan² upgrading/sortasi hasilbumi² bersangkutan, karena terdapat kapasitas perusahaan² melebihi kesanggupan produksi setempat.

Dengan pertimbangan tersebut diatas maka dengan Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri tgl. 28 September 1965 No. 135/MPDN/SK/65 telah ditetapkan larangan investasi untuk pembangunan baru perusahaan upgrading/sortasi lada, kopi dan remilling dalam wilayah Daerah Tingkat I Lampung, baik Perusahaan² Niaga maupun Perusahaan swasta lainnya.

Kepada Perwakilan Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri Daerah Tingkat I Lampung diinstruksikan untuk tidak lagi mengeluarkan „IZIN BERUSAHA”.

Larangan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri tersebut tidak berlaku terhadap investasi dalam kegiatan upgrading pabrik dan/atau barang² hasil bumi jang baru digali untuk diekspor.

3. Tentang SIPAP untuk kopra ex Kalimantan Timur.

Untuk pengangkutan kopra dari Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Kepada Tjabang Di rektorat Ekspor Balikpapan dan/atau **Seksi Ekspor Perwakilan Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri di Samarinda** dapat mengeluarkan Surat Izin Pengangkutan Antar Pulau SIPAP tanpa persetujuan Direktorat Ekspor Pusat, dengan ketentuan :

- a. berdasarkan stock jang njata dan setelah ada izin dari Gubernur/KDH Kalimantan Timur.
- b. tujuan pengiriman hanya tempat² pelabuhan di Jawa untuk kebutuhan konsumsi;
- c. pengirim maupun penerima masing² harus memenuhi syarat sebagai pedagang antarpulau.
- d. djatah kopra ex Kalimantan Timur jang dapat diantarapulaukan adalah kuranglebih seratus enam puluh lima (165) ton per bulan.

4. Penggunaan deferred - payment Pemerintah Djepang sebesar US\$ 12 djuta C & F.

Dengan Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri tanggal 23 September 1965 No. 0151/9/MPLN/SK/65 telah ditetapkan penggunaan deferred payment Pemerintah Djepang sebesar US\$ 12 djuta C & F sebagai berikut :

- a. Projek Aspal Buton dari Dep. Binamarga US\$ 5.8 dj
- b. Projek industri ringan jang akan ditentukan oleh Dep. Perindustrian Ringan US\$ 5.0 dj
- c. Projek Produksi sandang oleh Dep. Perindustrian Tekstil US\$ 1.2 dj

Implementasi pengimporan barang² jang diperlukan projek² tersebut diatas akan dilakukan oleh Perusahaan Niaga Negara jang ditunjuk oleh Departemen² jang bersangkutan.

Keputusan tersebut merobah ketentuan dalam Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri tanggal 11 Sept. 1965 No. 0145/9/MPLN/SK/65.

5. PENDJELASAN TENTANG PENDJUALAN TEMBAKAU KENEGERI BELANDA

Untuk menghindari interpretasi jang berbeda² mengenai pendjualan tembakau kenegeri Belanda, bersama ini didjelaskan bahwa :

- a. pendjualan tembakau kenegeri Belanda atas dasar L/C adalah merupakan suatu pertjobaan (try out);
- b. diharapkan nilai devisa jang akan diterima melebihi dari hasil pelelangan.
- c. pelaksanaan pendjualan tembakau oleh P.N. CARYA PUTRA ini dimaksudkan guna men dapatkan biaja untuk pembangunan dok² Industri Maritim, jang termasuk dalam Proyek Mandataris.
- d. Djika nanti hasilnja tidak sebagaimana diha rapkan, maka pendjualan tembakau tersebut akan dihentikan.

6. Penertiban para eksportir untuk lada jang dihasilkan Dati I Lampung.

Berhubung dengan telah ditegaskannja daerah (desa) merupakan basis utama Ekonomi Nasional kita, perlu diadakan ketentuan² jang memungkinkan memperbesar dajajipta dan dajakerdja daerah (desa) untuk nantinja dapat membangun dengan kekuatan sendiri.

Untuk merealisasikan hal tersebut, maka dengan Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri tanggal 28 September 1965 No. 0152/9/MPLN/SK/65 telah ditetapkan ketentuan² mengenai penertiban para eskportir untuk lada jang dihasilkan Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan, bahwa para eksportir dari lada jang dihasilkan Dati I Lampung, diizinkan terus mengekspor apabila perusahaan² tersebut memenuhi sjarat² sebagai berikut :

- a. harus berdomisili di Daerah Tingkat I Lampung;
- b. memiliki alat² upgrading/sortasi lada.

Untuk para eksportir jang telah berdomisili di Daerah Tingkat I Lampung dan selama ini meng ekspor tanpa memiliki alat² upgrading/sortasi diizinkan djuga terus mengekspor, dengan ketentuan agar dalam upgrading/sortasi lada jang akan didjualnja keluarnegeri, bekerdjasma dengan Perusahaan Sortasi Lada DWIKORA kepunjaan ex P.N. Djaya Bhakti.

7. Pengakuan eksportir tembakau Djawa — Timur, Djawa Tengah, Sumatra Utara dan Sulawesi Selatan, tidak diberikan lagi.

Untuk daerah Djawa Timur, Djawa Tengah, Sumatra Utara dan Sulawesi Selatan pengakuan eksportir produsen tembakau tidak diberikan lagi. Semua stock jang ada pada pedagang² disalurkan melalui P.N.N.² (Perusahaan² Niaga Negara) atau eksportir produsen swasta jang sudah diakui oleh Dep. Perdagangan.

Permohonan² eksportir produsen tembakau baik melalui daerah maupun pusat tidak akan dipertimbangkan lagi.

8. Pembentukan Perusahaan Makelar Tembakau Indonesia di Bremen.

Untuk memperkokoh front terdepan dalam menghadapi para pembeli/konsumen tembakau Indonesia di pasaran internasional, perlu mendirikan Perusahaan Makelar Tembakau Indonesia di Bremen, dengan bentuk dan tjorak jang disesuaikan dengan kepentingan nasional.

Dengan pertimbangan tersebut, maka dengan Keputusan Bersama Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Menteri Perkebunan tanggal 18 September 1965 No. 0149/9/MPLN/SKB 65

SK/126/Men.Perk/1965

telah ditetapkan pembentukan Perusahaan Makelar Tembakau Indonesia jang berkedudukan di Bremen dengan nama PERANTARA GmbH.

„PERANTARA” GmbH merupakan suatu badan hukum jang disesuaikan dengan Undang² dan Peraturan² jang berlaku di Djerman Barat.

Pemegang saham dari PERANTARA GmbH terdiri hanja dari TEMINDO GmbH dan BPU — PPN TEMBAKAU jang bersama-sama akan menentukan modal jang diperlukan oleh perusahaan.

Sebagai project officer untuk menjelesaikan pembentukan PERANTARA GmbH tersebut dalam waktu jang sesingkat²nja, telah ditundjuk Drs. SIMANDJUNTAK di Bremen.

9. Pilot project Nusa Tenggara Timur.

Dengan Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 0140/9/MPLN/SK/65 telah ditetapkan ketentuan² mengenai pelaksanaan ekspor dalam rangka Pilot Project Nusatenggara Timur.

Ekspor dilakukan dibawah kordinasi project Officer dengan ketentuan² pelaksanaannja sebagai berikut :

1. Pelaksanaan ekspor :
 - a) untuk ternak : P.N. Fadjar Ternak
 - b) untuk kopra : P.N. Pembangunan Niaga II dan P.N. jang ditundjuk oleh Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri dengan bekerdjasma dengan Koperasi Kopra di Nusatenggara Timur.
 - c) untuk kaju : B.P.U. Perhutani dan P.N. Aduma Niaga

2. Tudjuan dan penampungan ekspor : ekspor tudjukan untuk ternak ke Hongkong dan untuk kopra dan kaju ke Djepang, Eropah dan U.S.A dengan menetapkan PERWAKILAN NIAGA setempat sebagai penjalur/penampung/pembeli

Pembagian Tugas Gubernur² Pengganti B. N. I.

Para Gubernur Pengganti Bank Tunggal B.N.I telah ditetapkan tugasnya dalam Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral tgl. 6 September 1965 sebagai kelanjutan dalam rangka mengemban ketentuan² pokok serta bagian dari struktur organisasi termasuk tujuan pembinaan Bank Tunggal tersebut.

Dalam hubungan ini, para Gubernur Pengganti ditetapkan membantu Menteri Urusan Bank Sentral dalam memimpin, membina dan mengawasi bidang² yang menjadi tugas BNI dan tugas lain yang akan ditetapkan kemudian oleh Menteri UBS sebagaimana telah ditetapkan dalam SK Menteri UBS No. Kep. 72/UBS/1965. Ditetapkan juga para Gubernur Pengganti menjadi anggota Dewan Pembantu Pimpinan Menteri UBS.

Pembagian tugas ditetapkan sebagai berikut :
R. Hertatijanto S.H. sebagai Koordinator Umum Pertama, yang bertugas :

- a. setjara umum membantu dan mewakili Menteri UBS apabila berhalangan dan/atau jika ditunjuk oleh Menteri;
- b. setjara khusus mengkoordinasikan semua kegiatan² dan usaha² serta segala pekerjaan Bank Tunggal dalam bidang Administrasi (perencanaan, perlengkapan dan pengawasan atau lazim juga disebut bidang² Service dan Control) yang meliputi Divisi Research, Perencanaan dan Pengembangan Divisi Personalia dan Pendidikan, Divisi Logistik, Divisi Pembimbingan/Pengawasan Perbankan dan Administrasi.

Potan Arif Harahap S.H. sebagai koordinator Umum Kedua, yang bertugas : setjara umum membantu dan mewakili Menteri UBS apabila Menteri dan Koordinator Umum Pertama berhalangan dan/atau ditunjuk oleh Menteri; setjara khusus mengkoordinasikan semua kegiatan dan usaha² serta pekerjaan Bank Tunggal dalam bidang Operasional yang meliputi Divisi Pentjetakan dan Peredaran Uang, Divisi² Kredit, Divisi Penjeratan, Divisi Pengedaran Dana² dan Djasa² dan Divisi Hubungan Lalu Lintas Pembayaran dengan Luar Negeri.
Brigdjen Suhardi sebagai Pembantu Koordinator Pertama, yang bertugas : setjara umum

membantu dan mewakili Koordinator Umum Pertama; setjara khusus mengkoordinasikan usaha² dan pekerjaan² dibidang Divisi Pengawasan dan Administrasi, Divisi Pembimbingan/Pengawasan Perbankan dan Divisi Research, Perencanaan dan pengembangan dan/atau menurut pembagian pekerjaan yang dimufakati berdua dengan persetujuan Menteri UBS.

4. *Andi Faisal* sebagai Pembantu Koordinator Umum Kedua yang bertugas : setjara khusus membantu mewakili Koordinator Umum Kedua; setjara khusus mengkoordinasikan segala usaha² dan pekerjaan² dibidang Divisi Pentjetakan dan Peredaran Uang, Divisi Hubungan Lalu Lintas Pembayaran dengan Luar Negeri dan Divisi² Kredit dan/atau pembagian pekerjaan yang dimufakati berdua dengan persetujuan Menteri UBS.

5. *M. Djoena Koesoemahardja S.H.* diberi tugas khusus untuk mengadakan retooling dibidang Perkreditan sektor Tani dan Nelajan, dan dengan demikian setjara langsung memimpin B.N.I. Unit II dalam keseluruhannya.

Dalam hal² yang termasuk wewenang Menteri Urusan Bank Sentral sebagai Gubernur Bank Negara Indonesia, kepada Koordinator Umum Pertama dan Koordinator Umum Kedua bersama² atau salah satu dari mereka ber-sama² dengan salah seorang Gubernur Pengganti lainnya, diberi wewenang untuk mengambil keputusan² bilamana Menteri Urusan Bank Sentral berhalangan.

Bank Dagang Negara tetap berlangsung.

Dalam rangka mempertinggi efektifita dan efisiensi serta usaha yang sedang dan akan terus dilakukan, maka Bank Dagang Negara perlu tetap dilangsungkan berdasarkan Undang-Undang Pendiriannya (UU No. 13 Prp. tahun 1960) dan dalam struktur, organisasi serta kegiatan² sebagai sediaan dengan ketentuan untuk selalu menjeraskan kegiatan²nja yang bersifat moneter-tehnis dengan Bank Negara Indonesia. Demikian antara lain ditetapkan dalam Penetapan Presiden R.I. No. 21 tahun 1965.

BANK PEMBANGUNAN DAERAH

DJAKARTA — RAYA

Perwakilan : Djalan Pintu Besar Selatan no. 90

Telp. 20211 - 23311 - 23512.

Kantor Pusat : Djalan Perniagaan Timur no. 20

Telp. 21936.

Djakarta-Kota (Indonesia)

Melajani kepentingan dalam beberapa bidang pembangunan Pemerintah dan Swasta.

TUGAS DAN PERSONALIA

PERWAKILAN BLLD DI LUAR NEGERI

Dengan Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Negara Indonesia No. Kep. 97/UBS/65 telah ditetapkan beberapa pedjabat dan beberapa kantor² Perwakilan Bank Negara Indonesia di Luar Negeri sebagai Kepala Perwakilan/Wakil/Pedjabat dan Kantor Perwakilan Biro Lalu Lintas Devisa.

Oleh Pimpinan BLLD telah ditetapkan Kantor² Perwakilan BLLD di Luar Negeri beserta nama² pedjabat intinja jang masing² diberi wewenang untuk menandatangani atas nama Perwakilan BLLD bersangkutan.

Tugas dari Kantor² Perwakilan BLLD, disamping tugas khusus jang telah diinstruksikan oleh Pimpinan BLLD pada umumnja meliputi hal² sbb. :

1. Mengumpulkan data² jang berguna bagi BLLD Djakarta sepandjang mengenai impor dan ekspor dari negara² dalam wilayah kerdja masing²
2. Membantu Eksportir² Indonesia dalam menyelesaikan claim ekspor bilamana dimintanja.
3. Memberi penerangan/pendjelasan mengenai sekitar peraturan²/ketentuan² lalulintas devisa Indonesia.

Segala pengeluaran² jang berhubungan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada keuangan Kantor Perwakilan BLLD jang berada dalam penjaminan dan pengawasan Kepala Perwakilan Bank Negara Indonesia c.q. BLLD setempat.

LAMPIRAN surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Negara Indonesia No. Kep. 97/UBS/65 tanggal 23 September 1965.

Nama dan djabatan pedjabat :	Kantor Perwakilan BLLD dan alamatnja :	a) Tgl. mulai berlaku. b) Wilayah kerdja :
1. Sdr. M. Rifai Wakil Kantor Perwakilan Bank Negara Indonesia di R.P.A. sbg. Kepala Perwakilan Biro Lalu Lintas Devisa untuk Afrika dan Timur Tengah.	CAIRO The Respresentative Bank Negara Indonesia c/o Indonesia Trade Commission for the Midle East, cl Din Salah fourth floor, Garden City Cairo (U.A.R.) Alamat kawat : Perwakim.	a) 21 Djuli 1965. b) Sama dengan Kantor Perwakilan Bank Negara Indonesia
2. Sdr. R.S. Natalegawa Wakil Bank Negara Indonesia di Djepang sbg. Kepala Perwakilan BLLD untuk Asia Tenggara.	TOKYO Kantor Perwakilan BLLD Tokyo Nihkutsu International Building Rooms 810 & No. 1 chome, Yurakocho Chijvoda-Ku Tokyo. Alamat kawat : Delegasi Tokyo.	a) 8 Djanuari 1965. b) Sama dengan Kantor Perwakilan Bank Negara Indonesia
3. Sdr. Idris Batangtaris Anggota Staf Perwakilan BLLD untuk Asia Tenggara dengan wewenang tanda tangan (senior officer).	— i d e m —	
4. Sdr. R.B. Gandasubrata S.H. Pemegang Kuasa Bank Negara Indonesia di Eropah sbg. Kepala Perwakilan BLLD di Eropah.	AMSTERDAM Kantor Perwakilan BLLD Amsterdam Keizergracht 666/8 Amsterdam. Alamat kawat : Delegasi Amsterdam.	a) 8 Djanuari 1965. b) Sama dengan Kantor Perwakilan Bank Negara Indonesia
5. Sdr. M.P. Hutabarat Drs. Ek. Pembantu Pem. Kuasa Bank Negara Indonesia di Eropah diperbantukan pada Perwakilan BLLD dengan wewenang tanda tangan.	— i d e m —	

Sdr. Bachtaroedin
Anggota Staf Perwakilan BL-
LD dengan wewenang tanda
tangan.

AMSTERDAM
Kantor Perwakilan BLLD Ams-
terdam Keizersgracht 666/8,
Amsterdam.
Alamat kawat : Delegasi Amster-
dam.

Sdr. E.E.P. Peublen
Anggota Staf pada perwakilan
Bank Negara Indonesia diper-
bantukan pada Perwakilan
BLLD dengan wewenang tan-
da tangan.

— idem —

Sdr. Nandang Komar
Anggota Staf pada Perwaki-
lan Bank Negara Indonesia
diperbantukan pada Perwaki-
lan BLLD dengan wewenang
tanda tangan.

AMSTERDAM
Kantor BLLD Amsterdam Kei-
zersgracht 666/8 Amsterdam.
Alamat kawat : Delegasi Amster-
dam.

Sdr. J.A. Serek
Wakil Bank Negara Indonesia
di USA sbg. Kepala Perwaki-
lan BLLD di Amerika Seri-
kat.

NEW YORK
The Representative of the Indo-
nesian Foreign Exchange Bureau
25 Broadway Suite 1126 New
York, N.Y.
Alamat kawat : Indoclaim.

a) 16 Agustus 1965.

b) Sama dengan Kantor Perwa-
kilan Bank Negara Indonesia.

Sdr. Boerhanoeddin
Anggota Staf Perwakilan
BLLD di Amerika Serikat
dengan wewenang tanda-
tangan (senior officer).

— idem —

P. T. KAPOK INDONESIA

(PERUSAHAAN NEGARA)

PEMBELI, PENJUAL DAN EKSPORTIR TUNGGAL UNTUK HASIL
KAPOK INDONESIA

TURUT SERTA MEMBANTU PEMERINTAH DALAM MEMPERBESAR EKSPOR,
HASIL BUMI INDONESIA DEMI SUKSESJA REVOLUSI DALAM BIDANG
PEREKONOMIAN.

Kantor Pusat :

Djl. R. Patah 33, Semarang
Tilp. Sm. 668
Cable : PTKAPOK SEMARANG.

Tjabang Djawa Tengah :

Djl. R. Patah 33, Semarang
Tilp. Sm. 649 — 1780
Cable : KAPOK SEMARANG.

Tjabang Djawa Timur :

Djl. Radjawali 5, Surabaya
Tilp. U. : 3658 — U. 3682
Cable : KAPOK SURABAJA

Perwakilan Tegal :

Djl. Diponegoro 34, Tegal
Tilp. 242
Cable : PERKAPOK TEGAL.

Perwakilan Makasar :

Djl. Kalimantan 88, Makasar
Cable : PERKAPOK MAKASAR.

Perwakilan Djakarta :

Djl. Teuku Tjhik Ditiro 46
Flat 18, Djakarta
Tilp. Menteng 702
Cable : PERKAPOK DJAKARTA

P. N. DHARMA NIAGA

IMPOR : Mesin² untuk Pertjetakan — Industri — Pertanian — Perkebunan — Tekstil.

Mesin² Perkakas — Pendingin — Minjak Kelapa — Pompa² dan Mesin untuk Pembangunan.

Alat² Besar — Kereta Api — Mesin² Pertambangan Clark Forklifts. Mesin² DIESEL/Generating sets — Alat² RADIO/elektronik/Telekomunikasi dan motor² listrik.

PERDAGANGAN UMUM : Dalam Negeri/Antar Pulau.

INSTALASI : Telepon dan listrik dengan tenaga² Ahli.

PERBENGGKELAN : Service dan pemasangan mesin.

Kantor Pusat :

Djalan Tanah Abang Barat 6 - 8 - 10 — Djakarta.
P.O. Box 2028 — Tel. 47557 - 47577 - 49978 - 41974
Telex 292

Kantor Tjabang Djakarta

Djalan Djembatan Batu 50 — Tel. 22041 22042 - 22043 - 22044
Djakarta Kota.

Tjabang-Tjabang :

BANDUNG — SEMARANG — SURABAJA — MEDAN —
PONTIANAK — PALEMBANG — TJIREBON — JOGJA
KARTA — MALANG — DJEMBER — BANDJARMASIN —
MAKASSAR — MENADO — AMBON — DENPASAR —
BANDA ATJEH — PADANG dan PAKANBARU.

Undang² Devisa 1964

UNDANG-UNDANG No. 32 TAHUN 1964

ESIDEN REPUBLIK INDONESIA

nimbang :

bahwa dalam rangka penjusunan perekonomian pada taraf Nasional Demokratis menudju kearah pembangunan Negara dan Masyarakat Sosialis Indonesia jang adil dan makmur berdasarkan Pantja Sila sebagaimana digariskan dalam Manifesto Politik dan Deklarasi Ekonomi, perlu diganti peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan jang diwariskan dari kekuasaan Kolonial ;

bahwa devisa merupakan salah satu alat dan sumber pembiayaan jang penting untuk Negara dan oleh karena itu persoalan lalu lintas devisa perlu diatur sebaik-baiknya untuk memperlantar lalu lintas perdagangan/pembayaran dengan luar negeri dan untuk memperkuat kedudukan keuangan Negara dalam bidang devisa melalui pengerahan dana dan daja dari seluruh masyarakat ;

bahwa "Deviezen Ordonnantie 1940" dan "Deviezen Verordening 1940" menurut sifatnja dan maknanya bertentangan dengan peraturan devisa jang diperlukan pada tingkat Revolusi Indonesia dewasa ini, dan perhubung dengan itu perlu diganti dengan peraturan devisa baru untuk mentjapai tudjuan-tudjuan tersebut diatas ;

ingat :

Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 23 dan pasal 33 Undang-undang Dasar ;

Ketetapan-ketetapan Madielis Permusiawaratan Rakjat Sementara No. I/MPRS/1960 No. II/MPRS/1960 dan No. IV/MPRS/1963 ; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ;

MEMUTUSKAN :

jabut :

"Deviezen Ordonnantie 1940" (Stbl. 1940 No. 205) dan "Deviezen Verordening 1940" (Stbl. 1940 No. 291), kedua-duanya sebagaimana telah diubah dan ditambah ;

etapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERATURAN LALU LINTAS DEvisa sebagai berikut :

B A B I.

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Untuk mendjalankan Undang-undang ini dan peraturan-peraturan jang didasarkan atasnja, maka jang diartikan dengan istilah :

Dewan adalah : Dewan Lalu Lintas Devisa ;

Biro adalah : Biro Lalu Lintas Devisa ;

Bank adalah :

Barang adalah : emas, emas jang belum atau telah diolah, perak, ketjuai emas jang berwujud perhiasan atau barang lain ;

4. Devisa adalah :

- saldo bank dalam valuta asing jang mempunjai tjabatat kurs resmi dari Bank Indonesia ;
- valuta asing lainnja, tidak termasuk uang logam, jang mempunjai tjabatat kurs dari Bank Indonesia.

5. Efek adalah :

Tanda pentjabatat dalam buku pindjaman atau daftar saham, obligasi, surat gadai, saham dan tanda keuntungan termasuk talon, kupon dan bukti deviden.

6. Bank Devisa adalah :

Bank Indonesia dan Bank Negara lain jang ditundjuk olehnja untuk mendjual, membeli dan menjimpan devisa serta menjelenggarakan lalu lintas pembayaran dengan luar negeri ;

7. a. Badan Hukum Indonesia adalah :

Suatu badan hukum jang didirikan menurut hukum Indonesia dan disahkan oleh instansi jang berwajib menurut hukum itu, jajasan jang didirikan sesuai dengan hukum Indonesia, tidak termasuk badan hukum jang saham-sahamnja sebagian atau seluruhnja berada dalam tangan warga-negara asing atau badan hukum asing.

b. Badan Hukum asing :

Suatu badan hukum jang tidak tertjakup dalam sub a.

8. Impor adalah :

Pemasukan barang dari luar Indonesia kedalam peredaran.

9. Ekspor adalah :

Pengiriman barang keluar Indonesia dari Peredaran. Dengan ekspor djuga diartikan :

- melaporkan barang untuk ekspor pada pegawai Bea dan Tjukai jang bersangkutan ;
- menjerahkan barang kepada seorang pengusaha pengangkutan untuk diangkut keluar negeri ;
- memasukan barang kedalam sebuah alat pengangkutan atau memasangnja pada sebuah alat pengangkutan atau mempunjai persediaan barang didalam pengangkutan jang langsung atau tidak langsung akan diberangkatkan keluar negeri, diikalau tidak dapat dianggap bahwa barang itu dimasukan untuk tinggal didalam negeri ;
- menyiapkan sebuah alat pengangkutan untuk berangkutan diikalau alat itu djelas dimaksudkan untuk diekspor ;
- tidak membongkar barang ditempat jang telah ditentukan dalam masa waktu jang telah ditetapkan — jang mungkin diperdjandjang — dalam hal barang itu menurut dokumen-dokumen jang telah diserahkan pada Bea dan Tjukai atau jang telah dibuat berdasarkan keterangan lisan oleh Bea dan Tjukai, sedang diangkut dari satu tempat di Indonesia ketempat-tempat jang lain didalam wilayah Indonesia, ketiuali diikalau jang berkepentingan membuktikan bahwa barang itu telah dibongkar ditempat jang lain di Indonesia ataupun bahwa barang itu dalam perjalanan ketempat itu telah hilang.

B A B II.

PENGUASAAN DEvisa OLEH NEGARA

Pasal 2.

Devisa yang berasal dari kekayaan alam dan usaha Indonesia dikuasai oleh Negara seperti ditetapkan dalam pasal 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 dari Undang-Undang ini dalam Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan pasal yang tersebut terahir dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan selanjutnja.

B A B III.

DANA DEvisa.

Pasal 3.

- (1). Devisa yang diharuskan untuk diserahkan menurut pasal 9 ayat (1) dan pasal 10 merupakan Dana Devisa.
- (2). Dana Devisa ditata-usahakan dan diurus oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.

B A B IV.

DEWAN LALU LINTAS DEvisa

DAN

BIRO LALU LINTAS DEvisa

Pasal 4.

Agar devisa yang diperlukan guna pemeliharaan ekonomi masyarakat, peninggian tingkat hidup rakyat serta pembangunan Negara dalam arti materiil dan spirituil tersedia, maka wewenang merupakan Dana Devisa dan pengaturan devisa lainnja dalam rangka suatu anggaran Devisa ditugaskan pada suatu Dewan Lalu-Lintas Devisa yang diketuai oleh Perdana Menteri/Wakil-wakil Perdana Menteri, Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan sebagai Wakil Ketua dan anggota-anggotanya terdiri dari Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri-Menteri yang berkewajiban langsung dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5.

- (1). a. Pelaksanaan tugas sehari-hari dari Dewan termaksud pada pasal 4 diatas diserahkan kepada Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia ;
b. Sebagai alat pelaksanaan dalam hal ini di Djakarta diadakan suatu Biro Lalu Lintas Devisa yang pimp'nannja ada ditangan Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia.
- (2). Organisasi, tugas dan wewenang Biro selanjutnja ditetapkan oleh Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia mengingat petunjuk-petunjuk dari Dewan.
- (3). Untuk menutup biaya-biaya yang diperlukan dapat dipungut retribusi yang besarnya dan tjara memungutnja diatur oleh Dewan.

Pasal 6.

Guna penjelenggaraan tugasnja seperti termaksud pada pasal 4 Pimp'nan Biro dengan mengingat petunjuk-petunjuk Dewan berwenang untuk :

- a. memerintahkan setiap orang, badan hukum perse-orangan, dan perserikatan orang lainnja yang berada di Indonesia supaya disampaikan kepadanya keterangan dan laporan mengenai transaksi dan lalu lintas devisa dan lain-lainnja yang dianggap perlu ;
- b. memerintahkan diadakannja penyelidikan oleh satu atau beberapa orang ahli atau badan yang ditunjuk olehnja.

Barang siapa diminta bantuannja guna penyelidikan termaksud, wadajib memberikannja.

B A B V.

EKSPOR BARANG DAN PEMBERIAN DJASA

Pasal 7.

- (1). Ekspor barang yang berada didalam wilayah Indonesia keluar negeri atau pendjualan barang yang berada di luar Indonesia dan berasal dari Indonesia yang belum didjual harus dilakukan dengan menuntut pembayaran dalam devisa menurut harga dan sjarat yang ditentukan dan diumumkan oleh Pimpinan Biro.
- (2). Penjerahan devisa kepada Dana Devisa yang ditentukan dibawah ini berdasarkan atas harga termaksud ayat (1).
Harga ini dinamakan harga penjerahan.

Pasal 8.

- (1). Barang siapa hendak melakukan ekspor seperti termaksud dalam pasal 7 berkewadajiban untuk menutup kontrak-valuta dengan suatu bank devisa menyerahkan piutang itu kepada bank devisa, yang diambil-alih atau ditagih pembajarannja.
- (2). Kontrak-valuta termaksud dalam ayat (1) terdapat pada jumlah valuta asing yang dihitung berdasarkan harga penjerahan dan harus ditagih pada valuta yang sama dienisnja serta meniebutkan diwaktu penjerahan seperti telah ditentukan oleh Pimpinan Biro.
- (3). Pada waktu mengirinkan barang keluar negeri portir diwadiibkan untuk meniamoaikan kepada pejabat Bea dan Tiikal setempat dari mana barang ekspor Indonesia akan dikirimkan keluar negeri suatu pemberitahuan tentang pengeluaran barang yang bentuknja ditetapkan oleh Pimpinan Biro. Pemberitahuan termaksud harus disusun sesedemikian dan disampaikan dengan disertai kontrak valuta sebagaimana termaksud dalam ayat (1).

Pasal 9.

- (1). Barang siapa telah mengekspor barang berkewajiban untuk :
 - a. menjerahkan dokumen yang dapat dipergunakan dan yang membuktikan hak sipemerintah atas barang yang diekspor kepada suatu bank devisa ;
 - b. mendjual djumlah valuta asing yang harus diserahkan kepada Dana Devisa kepada bank devisa yang terketjual ; yang mengekspor dapat membuktikan bahwa pendjualan valuta asing termaksud itu atau tidak dapat dilakukan karena hal-hal dikekuasaannja.
- (2). Bank devisa berkewadajiban untuk membeli valuta asing yang didjual kepadanya dengan membiayai nilai lawan dalam Rupiah yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah.

Pasal 10.

- (1). Pimpinan Biro mengingat petunjuk-petunjuk Dewan menentukan dalam hal pemberian manakah oleh warganegara Indonesia dan hukum Indonesia kepada luar negeri harus dipembayaran dalam devisa yang untuk sebagian seluruhnja harus diserahkan kepada Dana Devisa menurut sjarat yang ditentukan oleh Pimpinan Biro. Penentuan demikian dapat pula dilakukan terhadap pemberian djasa oleh warganegara asing atau hukum asing yang berada di Indonesia.
Pimpinan Biro dapat pula menundjuk sumber ber penerimaan devisa lainnja yang hasilnja diserahkan sebagian atau seluruhnja pada Dana Devisa.

1. Dalam hal seperti termaksud dalam ayat (1) Pimpinan Biro dapat menentukan, bahwa setelah djumlah valuta asing yang harus diserahkan kepada Dana Devisa tersedia untuk yang telah memberikan djasa, valuta asing itu harus didjual kepada bank devisa.

2. Bank Devisa berkewadajiban untuk membeli valuta asing itu dengan membayar nilai lawan Rupiah yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11.

1. Bank devisa yang telah membeli valuta asing seperti termaksud dalam pasal 9 ayat (2) dan pasal 10 ayat (3) berkewadajiban untuk menjerahkannya kepada Bank Indonesia.

2. Penggantian nilai lawan dalam Rupiah untuk devisa yang diserahkan Bank Indonesia ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

B A B VI.

IMPOR BARANG DAN PENERIMAAN DJASA DARI LUAR NEGERI ATAS BEBAN DANA DEVISIA.

Pasal 12.

1. Impor barang dari luar negeri atas beban Dana Devisa yang boleh diadakan diikalau untuk itu telah dikeluarkan izin umum atau khusus oleh Pimpinan Biro dengan syarat yang ditentukan olehnya.

Pasal 13.

1. Barang siapa telah mendapat izin untuk impor seperti dimaksud dalam pasal 12 berkewadajiban untuk menyetujui kontrak-valuta dengan bank devisa untuk djumlah yang disediakan oleh Biro untuk impor barang tersebut dan harus berbunyi dalam valuta yang sama dienisnia serta menjejutkan diangka waktu pembayaran seperti telah ditentukan oleh Biro.

2. Pada waktu memasukan barang dari luar negeri importir diwadibkan untuk Pemberitahuan itu harus sesederhana mungkin dan disampaikan dengan disertai izin sebagaimana termaksud dalam ayat (1).

Pasal 14.

1. Pengeluaran devisa lainnya daripada yang termaksud dalam pasal 12 atas beban Dana Devisa Negara hanya boleh dilakukan berdasarkan izin umum atau khusus yang dikeluarkan oleh Biro.

2. Perdiandjiaan-perdiandjiaan yang akan mengakibatkan beban atas Dana Devisa harus disetudjui lebih dahulu oleh Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia.

3. Jika nersetudjiaan tidak diberikan kewadajiban membayar hanya dapat dipenuhi dari devisa yang dimaksudkan dalam Bab VII.

B A B VII.

KEWAJIBAN DAN KEWAJIBAN LANGSUNG DI SERAHKAN KEPADA DANA DEVISIA.

Pasal 15.

1. Apabila sesuatu yang bertalian dengan penggunaan, pemindahan dan pemindahan hak atas devisa yang tidak diwajibkan untuk langsung diserahkan kepada Dana Devisa menurut pasal 11 diatur berdasarkan rentjana penggunaan devisa dengan Peraturan Pemerintah.

B A B VIII.

KEWAJIBAN MENDAFTAR DAN MENJIMPAN EFEK

Pasal 16.

1. Warganegara Indonesia atau badan hukum Indonesia

berkewadajiban untuk menjimpan dalam simpanan terbuka efek yang berbunji dalam mata uang lain daripada Rupiah, yang dimilikinja pada waktu peraturan ini mulai berlaku dan yang diperolehnja sesudah waktu itu, pada bank devisa.

2. Pemerintah atau pada korespondennja diluar negeri atas nama bank devisa Pemerintah bersangkutan. Penjimpanan ini harus dilakukan dalam batas waktu enam bulan sesudah peraturan ini berlaku atau tiga bulan sesudah efek diperolehnja.

(2). Kewadajiban tersebut dalam ayat (1) berlaku pula untuk warganegara asing dan badan hukum asing untuk :

- a. efek yang berbunji dalam mata uang Rupiah ;
- b. efek yang berbunji dalam mata uang lain daripada Rupiah, sekedar dimiliki; sebelum Undang-Undang ini berlaku.

(3). Bank tersebut dalam ayat (1) berkewadajiban untuk mendaftarkan efek yang disimpan padania menurut petunjuk Pimpinan Biro, dengan ketentuan bahwa efek yang diadjukan untuk disimpan setelah lewatnia diangka waktu yang ditetapkan diatas, hanya dapat didaftarkan dengan izin Biro.

(4). Dalam mendjalankan ketentuan dalam ayat (1) ditentukan bahwa efek yang dikeluarkan sebelum 29 Desember 1949 oleh badan hukum di Indonesia baik yang berwarganegara Indonesia maupun asing, dianggap sebagai efek yang harus disimpan dalam simpanan terbuka.

(5). Biro berwenang untuk menentukan bilamana efek yang telah disimpan dapat dikembalikan kepada yang berhak.

B A B IX.

L A R A N G A N.

Pasal 17.

(1). Impor dan ekspor mata uang Rupiah dilarang terketjual dengan izin Pimpinan Biro.

(2). Ekspor dari benda yang berikut :

emas

uang kertas asing

efek yang berbunji dalam mata uang Rupiah.

3. dilarang terketjual dengan izin umum atau khusus dari Biro.

(3). Pimpinan Biro dengan mengingat petunjuk-petunjuk Dewan dapat membatasi djumlah uang kertas asing yang dapat diimpor.

(4). Efek yang berbunji dalam mata uang lain daripada Rupiah dilarang diekspor oleh warganegara Indonesia, terketjual dengan izin umum atau khusus dari Biro.

(5). Warganegara asing atau badan hukum asing dilarang untuk membeli dan memperoleh dengan tjara dan dalam bentuk apapun djuga efek yang berbunji dalam mata uang Rupiah, ketjual dengan izin umum atau khusus dari Biro.

(6). Warganegara asing atau badan hukum asing dilarang untuk mengekspor efek termaksud dalam pasal 16 sub (2) (b), terketjual dengan izin dari Biro.

(7). Pimpinan Biro mengingat petunjuk-petunjuk Dewan dapat menentukan, bahwa warganegara asing atau badan hukum asing tertentu dilarang untuk memperoleh kredit dari bank atau mengadakan pindjaman, termasuk mengeluarkan obligasi, saham, tanda pindjaman djangka pandjang lainnya dan tanda pindjaman djangka pendek yang berbunji dalam mata uang Rupiah.

**KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM PIDANA DEVISA
DAN HUKUM ATJARA PIDANA DEVISA.**

Pasal 18.

Terketjuali djika suatu perbuatan dengan njata dalam Undang-Undang ini disebut kedjahatan atau pelanggaran pidana, semua perbuatan jang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan jang didasarkan atasnja dipandang sebagai pelanggaran administratif, jang hanja dikenakan denda administratif atau pidana administratif lain menurut ketentuan jang dikeluarkan oleh Pimpinan Biro mengingat petundjuk-petundjuk Dewan. Denda ini setinggi-tingginja berdjumlah duapuluh lima djuta Rupiah.

Pasal 19.

- (1). Dewan mempunjai hak interpretasi jang tertinggi tentang Undang-Undang ini dan tentang peraturan jang didasarkan atasnja.
- (2). Dewan berwenang mengusulkan kepada Menteri/Djaksa Agung agar terhadap sesuatu tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini tidak akan dilakukan penuntutan. Usul tersebut disertai dengan alasan-alasan.
- (3). Diaksa dan hakim dalam mendjalankan tugas kewadjiannja berdasarkan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman wadji mengingat ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2).

Pasal 20.

- (1). Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (6) maka pelanggaran pasal 7, 8, 9, 10, 11, 16 dan 17 jang dibuat dengan sengadja dan dapat berakibat kerugian untuk negara jang meliouti djumlah jang besarnja lebih dari nilai lawan 88,8671 gram emas murni dalam valuta asing untuk tiap perbuatan, dinjatakan sebagai kedjahatan.
- (2). Djika kerugian termaksud dalam ayat (1) besarnja tidak melebihi nilai lawan 8886,71 gram emas murni dalam valuta asing, maka pelanggaran itu dikenakan pidana pendjara selama-lamanja lima tahun dan/atau pidana denda setinggi-tingginja sepuluh djuta Rupiah.
- (3). Djika kerugian termaksud dalam ayat (1) besarnja melebihi nilai lawan 8886,71 gram emas murni dalam valuta asing maka pelanggaran itu diberl pidana pendjara selama-lamanja sepuluh tahun dan/atau pidana denda setinggi-tingginja seratus djuta Rupiah.
- (4). Barang terhadap mana perbuatan tersebut dalam ayat (2) dan (3) dilakukan dapat dirampas untuk Negara.
- (5). Djika kerugian jang tersebut dalam ayat (1) tidak melampawi nilai lawan 88,8671 gram emas murni dalam valuta asing, maka perbuatan itu dinjatakan pelanggaran administratif.
- (6). Djikalau pelanggaran pasal 7, 8 dan 9 berupa tidak melaksanakan ekspor sebagian atau seluruhnya ataupun bersifat tidak mentaati diangka waktu jang ditetapkan untuk suatu perbuatan dalam penielenggaraan ekspor, maka pelanggaran itu dipandang pelanggaran administratif.
- (7). Djika tindak pidana dilakukan tidak dengan sengadja, maka pidana tertingginja ditetapkan sepertiga dari pidana tertinggi apabila dengan sengadja.

Pasal 21.

Pelanggaran pasal 12 dan 13 dinjatakan sebagai pelanggaran administratif.

Pasal 22.

- (1). Barang siapa setelah mendapat perintah seperti termaksud dalam pasal 6 sub a dengan sengadja tidak memenuhi perintah itu tanpa alasan jang sah atau pun dengan sengadja menjampaikan keterangan jang tidak benar dalam memenuhi perintah itu, dipidana dengan pidana pendjara selama-lamanja satu tahun atau denda setinggi-tingginja satu djuta Rupiah.
- (2). Perbuatan ini merupakan kedjahatan.

Pasal 23.

- (1). Baran siapa karena djabatannja atau pekerdjaan tersangkut dalam penielenggaraan Undang-Undang ini dan peraturan jang didasarkan atasnja wajib merahasiakan semua jang diketahuinja karena jabatan atau pekerdjaan itu, ketjuali diika ia harus memberikan keterangan diustru karena djabatannja atau pekerdjaan itu terhadap pihak ketiga.
- (2). Kewadjiiban ini berlaku pula untuk para ahli jang berhubungan dengan penielenggaraan Undang-Undang ini dan peraturan jang didasarkan atasnja diminta memberikan nasehatnja atau jang diserahi melaku sesuatu pekerdjaan.

Pasal 24.

- (1). Barang siapa dengan sengadja melanggar kewadjiiban untuk merahasiakan sebagaimana termaksud dalam pasal 23 dipidana dengan pendjara selama-lamanja satu tahun atau denda setinggi-tingginja satu djuta Rupiah.
- (2). Perbuatan tersebut diatas merupakan kedjahatan.

Pasal 25.

- (1). Djika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang lainnja atau suatu jajasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukum pidana dituntutan tata tertib didjatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau jang lain itu, baik terhadap mereka jang memberi perintah melakukan tindak pidana itu atau jang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau keluarganya itu, maupun terhadap kedua-duanja.
- (2). Suatu tindak pidana dilakukan djuga oleh atau nama badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu jajasan, diika tindak pidana dilakukan oleh orang-orang jang baik berdasarkan hubungan kerdja maupun berdasar hubungan lain, maka tindak dalam lingkungan badan hukum, perserikatan atau jajasan itu, tak peduli orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana itu atau pada mereka bersama-sama anasir-anasir tindak tersebut.
- (3). Djika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau jajasan, maka badan hukum, perseroan, perserikatan atau jajasan itu pada waktu penuntutan itu diwakili oleh seorang pengurus, maka tindak pidana itu atau pada mereka bersama-sama anasir-anasir tindak tersebut, Wakil dapat diwakill oleh orang lain. Hakim dapat memerintahkan supaja seorang pengurus menghadap sendiri dipengadilan dan dapat memerintahkan supaja pengurus itu dibawa ke pengadilan.

- (4). Djika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu jajasan, maka segala panggilan untuk menghadap dan segala penjerahan surat panggilan itu akan dilakukan kepada kepala pengurus atau ditempat tinggal kepala pengurus atau ditempat pengurus bersidang atau berk

Pasal 26.

Untuk menjidikan tindak pidana jang tersebut dalam Undang-Undang ini disamping pegawai-pegawai jang pada umumnja diberi tugas menjidik tindakan pidana, ditundjuk pula :

- a. pegawai Bea dan Tjukai
- b. pegawai Biro jang ditundjuk oleh Dewan.

Pegawai penjidik tersebut diatas sewaktu-waktu berwenang untuk melakukan penjitaaan, begitu djuga untuk menuntut penjerahan supaja dapat disita daripada segala barang jang dapat dipakai untuk mendapatkan kebenaran atau jang dapat diperintahkan untuk dirampas, dimusnahkan atau dirusakan supaja tidak dapat dipakai lagi.

Mereka sewaktu-waktu berwenang untuk menuntut pemeriksaan segala surat jang dianggap perlu untuk diperiksa guna melakukan tugasnja sebagaimana mestinja.

Mereka sewaktu-waktu berwenang untuk memasuki semua tempat jang dianggap perlu guna melakukan tugasnja sebagaimana mestinja. Mereka berkuasa untuk menjuruh agar dikawani oleh orang-orang tertentu jang mereka tundjuk.

Djika dianggap perlu mereka memasuki tempat-tempat tersebut dengan bantuan polisi.

Pasal 27.

Biro berwenang untuk memerintahkan penjerahan barang atau efek, jang diperoleh dengan djalan melanggar Undang-Undang ini dan peraturan jang didasarkan atasnja atau dengan mana, ataupun tentang mana perbuatan itu telah dilakukan, atau jang merupakan pokok perbuatan sedemikian, dari jang melanggar, baik perseorangan maupun badan hukum.

Perintah ini dalam hal tindak pidana hanja dapat diberikan djikalau diputuskan bahwa tidak akan diadakan tuntutan.

Pemerintah termaksud diberikan dengan surat perintah tertjatat.

Djikalau dalam batas waktu 3 bulan perintah ini tidak dipenuhi, maka Biro dapat menetapkan djumlah paksaan dalam mata uang Rupiah jang harus dibayarkan kepadanya dalam batas waktu jang ditetapkan olehnja.

Djumlah paksaan jang tersebut dalam ajat (3) diatas dan denda administratif jang tersebut dalam pasal 18 dapat dipungut dengan surat paksa, jang dikeluarkan atas nama Pimpinan Biro dan dapat dilaksanakan menurut ketentuan mengenai surat paksa dalam peraturan pajak berkohir.

B A B XI.

KETENTUAN LAIN.

Pasal 28.

perdjandjian jang diadakan dengan melanggar Undang-Undang ini dan peraturan jang didasarkan atas-alah batal dalam arti jang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Perdata.

Pasal 29.

Dewan berwenang untuk mengeluarkan peraturan mengenai hal-hal jang belum diatur dalam Undang-Undang ini jang dianggap perlu untuk mentjapai maksud dan tudjuan Undang-Undang ini.

- (2). Peraturan termaksud dalam ajat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 30.

Dalam mendjalankan Undang-Undang ini, Pimpinan Biro dengan mengingat petundjuk-petundjuk Dewan dapat :

- a. mengeluarkan peraturan khusus untuk Perwakilan diplomatik dan Konsuler asing dan Perwakilan Perseorangan Bangsa-Bangsa serta Badan-badan Internasional sematjam itu berikut pegawai-pegawainja jang berstatus diplomatik atau Konsuler.
- b. mewadajibkan warga negara asing badan hukum asing tertentu jang diizinkan untuk berusaha di Indonesia untuk menjerahkan valuta asing kedalam "Dana Devisa Negara" dalam mendjalankan usahanja.

Pasal 31.

- (1). Surat permohonan untuk mendapat izin berdasarkan Undang-Undang ini atau peraturan pelaksanaannya dan djuga surat izinnja adalah bebas dari bea materai.
- (2). Kalau satu dari dua pihak dalam melakukan sesuatu perbuatan telah mendapat izin atau pembebasan, maka pihak jang kedua tidak perlu meminta lagi izin atau pembebasan.
- (3). Dari semua ketentuan Undang-Undang ini Dewan dapat memberikan pembebasan setjara khusus atau umum dan dalam kedua hal dapat ditetapkan sjarat-sjarat tertentu.
- (4). Dewan dapat mendelegasikan wewenang ini kepada Ketua Dewan atau salah seorang anggotanja.

Pasal 32.

PERATURAN PERALIHAN.

- (1). Pada hari mulal berlakunja Undang-undang ini :
 - a. Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dilebur sebagai badan hukum dan segala aktiva dan pasivanja beralih kepada Biro ;
 - b. segala aktiva dan pasiva "Dana Devisen" didjadian Dana Devisa.Hubungan kerdja antara Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dan para pegawainja diambil alih oleh Biro.
- (2). Djikalau untuk sesuatu hal menurut Undang-Undang ini diharuskan adanya suatu izin atau dari sesuatu kewadajiban dapat diberikan pembebasan, maka izin atau dari sesuatu kewadajiban dapat diberikan pembebasan, maka izin atau pembebasan jang telah diberikan berdasarkan Deviezen-verordening 1940 dianggap sebagai berdasarkan Undang-undang ini.
- (3). Segala peraturan pelaksanaan dari Deviezen-ordonantie 1940 dan Deviezen-verordening 1940 sekedar mengatur lebih lanjut hal-hal jang ditentukan dalam Undang-undang ini tetap berlaku pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, sampai ditarik kembali.
- (4). Penggunaan, pembebasan dan pemindahan hak atas valuta asing termaksud dalam Pengumuman Pimpinan L.A.A.P.L.N. No. 3 tanggal 27 Mei 1963 dan S.K.B. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan dan Urusan Bank Sentral No. IE/IU/KB/32/12/SKB No. Kep. 21/UBS/64 jo Kep. 26/UBS/64 dan Kep. 35/UBS/64. diperkenankan sampai pengumuman dan peraturan ini ditarik kembali.

- (5). Terhadap perbuatan-perbuatan yang menurut Deviezen-ordonantie 1940 dan Deviezen-verordening 1940 merupakan tindak pidana dan tidak lagi demikian halnya menurut Undang-undang ini, berlaku peraturan yang tersebut terakhir.
- (6). Bank Swasta yang telah ditunjuk sebagai bank devisa menjalankan fungsinya selama masa peralihan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 33.

- (1). Pasal 1 ayat 1 e sub f dari Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955) dihapuskan dan diganti hingga berbunyi sebagai berikut:
 "Pasal 7, 8 dan 9 dari Undang-Undang No. 32 tahun 1964 tentang "Peraturan Lalu Lintas Devisa 1964", terketjuali djikalau pelanggaran itu berupa

Diundangkan di Djakarta
 pada tanggal 28 Desember 1964
 SEKRETARIS NEGARA

ttd.

MOHD. ICHSAN

tidak melaksanakan ekspor sebagian atau seluruhnya ataupun tidak mentaati jangka waktu yang ditetapkan untuk suatu perbuatan dalam penjelegaraan ekspor".

- (2). Undang-Undang No. 4 Prp tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 91) dan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No. 2) ditarik kembali.

Pasal 34.

PERATURAN PENUTUP.

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Devisa 1964 dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya menentrintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta
 pada tanggal 28 Desember 1964
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUKARNO.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 no 1

KAPAS TAKARI

Pada hari tani 1965, tanggal 27 September, dalam rapat raksasa di Istora Bung Karno Senajan kepada Presiden telah dipersembahkan bibit kapas baru, hasil penemuan J.P.P.N. (Jajasan Peninggian Pertanian Nasional) yang dapat memberikan hasil duakali lipat daripada kapas biasa. Kapas tersebut kemudian oleh Presiden diberi nama "KAPAS TAKARI" (Antara).

(Sambungan hal. 20 **DUBBELE LES**

Kita kaum nasionalis Indonesia, kita, yang dikatakan sudah "nglindur" tentang kebebasan dan kemerdekaan, kita sering sekali mendapat peringatan atau "petunduk" tentang bagusnya orde pimpinan Eropah, djuga dari fihak yang setengah-setengah ethisch sebagai "Ind. Crt." itu. Tetapi kita tidak ingin orde pulasan; kita ingin orde sedjati; kita ingin orde yang timbulnja dari pada harmoni orde sedjati yang karenanja hanya bisa tertjapai dibawah kibarranja bendera Indonesia yang Merdeka.

Tulisan "Ind. Crt." memang berisi dubbele les bagi kita; ia berisi dua pengadjaran; ja, pertamanya memperkuat kejakinan kita akan benarnja paham persatuan-bangsa; dan kedua, ia menunjukkan pada kita, bahwa pimpinan asing umum-

nja tidaklah bisa mendatangkan orde, sebagaimana yang sudah terbukti dinegeri Mexico dengan terang-terangnja.

Memang! Bagi kita, kaum Nasionalis Indonesia soal ini sebetulnja bukanlah soal lagi. Soal sudah lamalah terdjawab dialam kejakinan kita. Sebab riwayat bangsa-bangsa Asia yang merdeka atau yang sudah mendjadi merdeka adalah njokong sikap kita; dengan memperhatikan riwayat ini, maka makin tebal dan makin teguh kejakinan kita, bahwa tiadalah bagi kita orde yang sedjati, melainkan orde kita sendiri.

Karenanja, maka tiada berobah serambut seruan kita: "Madju, kearah Persatuan, ma kearah Kemerdekaan Tanah Air dan Bangsa".

"Suluh Indonesia Muda", 1

PENDJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG No. 32 TAHUN 1964

TENTANG PERATURAN LALU LINTAS DEvisa

MUM.

Keputusan devisa yang hingga kini berlaku ditinjau air kita mulai diadakan pada pertengahan tahun 1940 oleh Pemerintah Hindia Belanda, dengan dikeluarkannya DEVEIZEN — ORDONNANTIE 1940 (Staatsblad 1940 No. 205, sebagaimana telah dirobohkan dan ditambah) serta DEVIZEN — VERORDENING 1940 (Staatsblad 1940 No. 291), sebagaimana telah dirobohkan dan ditambah). Pengalaman selama lebih dari 20 tahun menunjukkan bahwa kedua peraturan ini merupakan suatu sumber rintangan-rintangan terhadap kelanjutan dan perkembangan lalu lintas perdagangan dan lalu-lintas pembayaran antara Indonesia dan luar negeri yang sangat merugikan dan menghambat pembangunan Negara.

Deveizen-ordonnantie dan Deviezen-verordening pada hakekatnya menetapkan tjara dan sistim untuk menguasai seluruh penghasilan devisa serta seluruh kekayaan devisa dari pada penduduk devisa. Tjara dan sistim ini memuntjak pada penguasaan dari segala usaha, segala kegiatan dan segala hubungan segala lapangan, yang dapat menimbulkan konsekuensi-konsekwensi finansial terhadap luar negeri, dalam segala bentuknya dan segala detailnya.

Meskipun tjita-tjita untuk menguasai seluruh penghasilan devisa untuk Negara pada hakekatnya dan pada acunnya sesuai dengan tjita-tjita Sosialisme Indonesia, namun sistim dan tjara dari pada Deveizen-ordonnantie dan Deviezen-verordening, yang bersifat tidak konkrit dan berbelit-belit, telah menjijikan, khususnya bagi masyarakat yang bergerak dalam lapangan perdagangan internasional, suatu suasana yang penuh dengan perasaan takut kekhawatiran.

Jelaslah bahwa suasana demikian melemahkan daya pergerakan potensi dan kekuatan Rakjat, khususnya mematikan misi dari pihak produsen-produsen dan pengusaha-pengusaha kita dari kegiatan-kegiatan yang djustru merupakan sumber-sumber bagi Negara untuk memupuk kekayaan devisa.

Salah satu teknik yang dipakai dalam Deveizen-ordonnantie dan Deviezen-verordening yang tidak dapat dipertahankan adalah pembagian masyarakat Indonesia dalam dua golongan, yaitu:

- golongan "penduduk-devisa" dan
- golongan "bukan penduduk devisa".

Sehingga karena penarikan garis oleh Deveizen ordonnantie dan Deviezen-verordening dilakukan dengan tidak memandang kebangsaan atau kewarganegaraan, maka semua warganegara, baik Indonesia maupun asing, dapat digolongkan sebagai "penduduk devisa" dan "bukan penduduk devisa".

Sehingga demikian Deveizen-ordonnantie mendjalankan penguasaan terhadap segala hubungan-hubungan kegunaan antara "penduduk devisa" dan "bukan penduduk devisa", sehingga djuga untuk transaksi-transaksi yang semata-mata bergerak didalam negeri dan dapat menjangkut soal-soal devisa biarpun dilakukan antara warga negara Indonesia harus dimintakan izin terlebih dahulu dari pembesar-pembesar devisa, djika oleh satu pihak merupakan "bukan penduduk devisa".

Sehingga bagian masyarakat Indonesia dalam dua golongan, yaitu golongan "penduduk devisa" dan golongan "bukan penduduk devisa" sudah terang merupakan

rintangan untuk menjijikan ekonomi nasional yang sehat. Oleh karena itu dalam kehendak kita untuk menjusun ekonomi yang bersifat nasional dan demokratis perlu pembagian Indonesia dalam dua golongan dihapuskan.

Untuk menjapai maksud itu diambil kewarganegaraan sebagai kriterium, agar supaya kepentingan nasional dapat diperhatikan sepenuhnya dalam lalu-lintas perdagangan luar negeri.

5. Selanjutnya sifat yang amat kaku dari Deveizen-ordonnantie dan Deviezen-verordening sangat menghambat kelanjutan dalam melaksanakan hubungan finansial antara Indonesia dan luar negeri. Sifat yang amat kaku ini yang pada hakekatnya melarang segala-galanya, terkecuali djika diizinkan setjara khusus atau umum, telah menimbulkan keharusan penetapan peraturan-peraturan penjelenggaraan yang jumlahnya demikian besarnya, sehingga keseluruhan ketetapan-ketetapan yang dikenal sebagai "peraturan-peraturan devisa" menjadi sangat kompleks dan sangat ruwet. Banyaknya dan berbelit-belit peraturan devisa itu dan kesimpang-siuran dalam interpretasi daripada peraturan-peraturan itu telah merupakan sumber rintangan-rintangan yang sangat menghambat kelanjutan dalam pembangunan Negara dibidang perekonomian.
6. Dalam menghadapi masalah ekonomi, kita sadar bahwa sisa-sisa kolonial dan sisa feodal dan demokian pula sifat-sifat hubungan ekonomi dan perdagangan dengan dunia luar masih djuga memberatkan rintangan dalam pertumbuhan kearah sosialisme Indonesia.

Dalam Deklarasi Ekonomi setjara jelas dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam melandjutkan pertumbuhan-pertumbuhan dibidang sosial dan ekonomi, maka kita harus bertitik pangkal pada modal yang sudah kita miliki ialah:

- a. Aktivitas ekonomi Indonesia dewasa ini kurang lebih 80% sudah berada ditangan bangsa Indonesia. Dalam tahun 1950 boleh dikatakan aktivitas ekonomi di Indonesia sebagian terbesar masih dikuasai oleh bangsa asing, sehingga baik Pemerintah maupun rakjat tidak dapat mengadakan perencanaan setjara pokok bagi pertumbuhan ekonomi setjara revolusioner.
- b. Pada waktu belakangan ini Pemerintah sudah mulai dapat setjara aktif aktivitas ekonominya dalam arti konsepsional, organisatoris dan struktural.
- c. Meskipun demikian kita belum dapat berkembang setjara mendalam oleh karena perhatian Pemerintah dan kekuatan rakjat masih dititik beratkan kepada penjusunan alat-alat Revolusi yang baru pada waktu sekarang ini dapat dikatakan lengkap.

Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa baru sekarang kita dapat menggerakkan segala usaha dan perhatian rakjat dan Pemerintah untuk menanggulangi persoalan ekonomi setjara konsepsional, organisatoris dan struktural dalam arti keseluruhannya.

7. Oleh karena itu maka diperlukan suatu approach yang lebih realistik dan ketentuan-ketentuan yang tegas dan sederhana dalam mengatur lalu lintas devisa antara Indonesia dan luar negeri, dengan mem-

gang teguh pada prinsip-prinsip rasionalisasi selaras pula dengan prinsip-prinsip demokrasi nasional.

Dalam hal ini dapat dinjatakan bahwa disamping penguasaan devisa dengan djalan mengharuskan penjetorannya dalam Dana Devisa dapat djuga dipakai penguasaan dengan menetapkan tjara pemakaiannya, suatu tjara yang dalam keadaan tertentu dapat berdjalan dengan lebih efisien.

8. Rasionalisasi berarti pula bahwa pengawasan harus ditunjukkan kepada sumber devisa yang terpenting. Bagi Negara kita, lalu-lintas perdagangan merupakan komponen yang terpenting; lebih dari 90% dari volume lalu lintas pembayaran dengan luar negeri merupakan lalu lintas perdagangan.

Berhubung dengan itu pengawasan lalu lintas pembayaran berarti terutama pengawasan terhadap lalu lintas perdagangan dengan luar negeri. Dalam hubungan ini harus diawasi bahwa penerimaan devisa dari ekspor yang harus diterima oleh Negara memang mengalir kedalam kas Negara untuk merupakan Dana Devisa. Djumlah yang harus diterima ini harus ditentukan setjara konkrit oleh Negara, supaya baik yang berwadjib menjerahkan devisa (eksportir) maupun badan-badan pengawas Pemerintah yang bersangkutan setjara mudah dan setjara mutlak dapat mengetahui tentang pemenuhan kewadjiban itu.

Sjak-wasangka dari pihak badan-badan pengawas diatas ataupun perasaan chawatir akan menjelahi peraturan-peraturan dari pihak eksportir, dengan demikian dapat ditiadakan.

9. Pengeluaran devisa atas beban Dana Devisa untuk impor hanja dapat dilakukan menurut tjara dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam hubungan ini baik Pemerintah maupun badan Pemerintah yang ditugaskan harus menetapkan setjara konkrit nilai yang dipandang lajak olehnya bagi barang-barang yang diizinkan untuk dibeli dari luar negeri.

10. Pengawasan terhadap penerimaan devisa dibidang djasa dapat dibatasi pada pos-pos yang terpenting sadja. Pada umumnya dapat ditentukan bahwa devisa yang diterima dibidang djasa harus diserahkan kepada Negara, djika penerimaan devisa itu setjara langsung dimungkinkan karena adanya peralatan atau fasilitas yang dimiliki atau dikuasai Negara, seperti biasa pelabuhan yang harus dipenuhi oleh perusahaan perkapalan asing. Penerimaan devisa oleh perseorangan berdasarkan djasa individuul tidak perlu diawasi.

11. Pengawasan harus dilakukan terhadap pengeluaran devisa untuk djasa atas beban Dana Devisa, karena lajak atau tidak lajaknya pengeluaran itu seperti djuga halnya dengan impor barang harus dipertimbangkan oleh Pemerintah dengan mengingat keperluan akan djasa itu dalam rangka kepentingan Negara dipelbagai bidang.

12. Pengawasan terhadap lalu-lintas modal perlu diadakan untuk menghindarkan pemindahan (pelarian) modal keluar negeri.

Pemindahan modal keluar negeri dapat dilakukan dalam bentuk investasi dana-dana diluar negeri oleh warganegara Indonesia.

13. Pendirian bahwa penerimaan devisa Negara meliputi djumlah-djumlah yang memang setjara konkrit diwadjabkan oleh Pemerintah untuk diserahkan kepada Dana Devisa, berarti bahwa pemilihan devisa tidak lagi terbatas pada Negara sadja. Disamping devisa yang merupakan Dana Devisa terdapat pula devisa yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, baik warganegara Indonesia maupun warganegara asing, yang

tidak diharuskan untuk diserahkan langsung kepada Dana Devisa. Dalam pada itu perlu pula diadakan penertiban tentang tjara penggunaan devisa yang termaksud dan penguasaannya oleh Negara atas pada tjara pemakaiannya seperti telah dinjatakan diatas sub 7.

14. Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa prinsip-prinsip yang dianut dalam Undang-undang ini fundamental sangat berlainan dengan prinsip-prinsip yang diletakkan dalam Deviezen-ordonnantie dan Deviezen-verordening.

Sebagai konsekwensi yang logis daripada pertentangan ini, maka banjak hal-hal yang dalam Deviezen-ordonnantie dan Deviezen-verordening merupakan larangan kini harus ditinggalkan.

Dengan demikian, dalam sistim lalu lintas devisa baru banjak perbuatan yang dengan sengadja tidak dilarang atau diharuskan memakai izin, misalnja: memiliki devisa, memiliki emas, mewakili warganegara Indonesia yang tidak mendjadi "penduduk devisa", mempundjai rekening bank diluar negeri, mengadakan perdjandjian dengan "bukan penduduk devisa", menerima undangan dari "bukan penduduk devisa" untuk berkundjung keluar negeri.

15. Berhubung dengan uraian diatas berbagai perbuatan yang dahulu semuanya merupakan tindakan pidana kini untuk sebagian dapat dikesampingkan, hal mana akan menjiptakan suatu suasana yang sehat guna perkembangan ekonomi nasional kita. Sebagian lain dari perbuatan yang dahulu dipandang bersifat pidana kini dianggap sebagai pelanggaran administratif, terketjuali djika pelanggaran itu dengan njata mengakibatkan kerugian terhadap Negara.

16. Perlu ditegaskan, bahwa peraturan ini mewujudkan struktur dari pada lalu lintas devisa antara Indonesia dengan luar negeri, yang merupakan suatu landasan untuk suatu politik devisa Pemerintah.

17. Akhirnya perlu didjelaskan bahwa ketentuan dalam Undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan-ketentuan termaktub dalam perdjandjian karya antara perusahaan-perusahaan minjak Negara dan perusahaan minjak asing, yang telah disahkan dengan Undang-undang.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sub 1 dan 2.

Tjukup djelas.

Pasal 1 sub 3.

Jang dimaksudkan dengan mata uang emas ialah mata uang emas yang menurut Undang-undang Keuangan yang berlaku dinegara yang bersangkutan merupakan uang emas yang sah. Djika tidak, maka barang yang berupa mata uang emas masuk golongan barang pakai atau barang perhiasan.

Pasal 1 sub 4.

Dengan sengadja bermatjam-matjam uang asing jang tidak dipakai untuk pembayaran internasional tidak dipandang devisa, seperti djuga halnya dengan mata uang asing logam bukan emas.

Pasal 1 sub 5 s/d 8.

Tjukup djelas.

Pasal 1 sub 9.

Arti ekspor dalam kalimat kesatu diperluas dalam kalimat kedua. Pemerintah akan mengadakan tindakan-tindakan agar pengeluaran ini tidak menimbulkan eksekse dalam pelaksanaannya.

Pasal 2.

Jang dapat dikuasai oleh Negara Republik Indonesia ngan sendirinja hanja devisa jang ada hubungannja ngan Negara atau rakjat kita. Djadi misalnja uang \$ jang dipegang oleh orang Amerika dinegaranja dari hanja disana, atau uang US.\$ jang merupakan hasil spor dari Sudan, adalah diluar penguasaan negara kita. lah jang dimaksudkan dengan perumusan "jang ber- dari kekajaan alam dan usaha Indonesia".

Siapa jang mengusahakan, bangsa Asing atau bangsa lonesia untuk ini tidak dibedakan. Kedalam batas- asnja mana jang dikuasai dirumuskan dengan lebih iti dalam pasal-pasal selanjutnja.

harus diinsjafi bahwa "penguasaan" tidak perlu senan- sa bersifat "pemilikan".

hkan dalam banjak hal penguasaan setjara pengaturan nakaiannja adalah lebih efsien daripada pemilikan, ngan efek sosial jang sama.

Pasal 3.

Tjukup djelas.

Pasal 4.

Dianggap perlu, bahwa pemupukan devisa negara jang erlukan guna pemeliharaan ekonomi masjarakat, pe- ggian tingkat hidup rakjat serta pembangunan Negara agaskan kepada instansi jang tinggi.

alam hal ini tugas itu diberikan kepada Dewan jang diri dari Menteri-Menteri, diketual oleh Perdana nteri/Wakil³ Perdana Menteri dan Menteri Koordina- Kompart:men Keuangan sebagai Wakil-Ketua.

ada permulaan dalam masa transisi ini barangkali um mungkin untuk menetapkan dan mentaati suatu raturan Devisa jang rigid, akan tetapi kita harus ber- ha keras untuk mentjapai taraf itu.

Pasal 5.

Tjukup djelas.

Pasal 6.

jika terhadap suatu bank diperintahkan diadakannja elidkan oleh satu atau beberapa orang ahli atau an, maka diindahkan ketentuan dalam Undang-undang 23 Prp tahun 1960.

Pasal 7 ayat (1) dan (2).

engan pasal ini ditentukan setjara konkrit harga jang hendaki oleh Negara dalam ekspor barang dari Indo- a.

engan penetapan demikian eksportir dapat mengeta- dengan djelas berapa besarnya djumlah devisa jang arus serahkan kepada Dana Devisa, sebaliknya Peme- h setjara mudah dan setjara mutlak dapat menge- i tentang pemenuhan kewajiban eksportir. Dengan penetapan harga demikian ekspor akan diperlantjar na tidak tergantung lagi pada perumusan jang abs- "de ter plaatse van levering geldende marktwaarde" rti ditentukan dalam pasal 15 ayat (1) dari Deviezen- rdening dahulu.

Pasal 8.

Tjukup djelas.

Pasal 9.

kumen-dokumen jang dimaksudkan disini adalah a lain:

semen, wesel, paktur.

Pasal 10.

at pendjelasan Umum.

Pasal 11.

Tjukup djelas.

Pasal 12.

Pelaksanaan impor atas beban Dana Devisa diatur menurut rentjana impor jang disesuaikan dengan kebu- tuhan pembangunan ekonomi jang urgen dalam rangka penetapan Anggaran Devisa untuk melaksanakan prinsip berdiri diatas kaki sendiri dibidang ekonomi.

Pasal 13.

Tjukup djelas.

Pasal 14.

Tjukup djelas.

Pasal 15.

Dalam Peraturan Pemerintah diatur tjara-tjara pengu- asaan jang lain dari pemukiman dalam Dana Devisa.

Penguasaan ini ditudjukan pada pemakaiannja dan meliputi djuga overprice, discount, komisi dan sebagai- nja.

Pasal 16.

Kewadjan ini telah ada dalam Deviezen-verordening 1940. Barang siapa telah memenuhi kewajiban ini berda- sarkan peraturan lama tidak perlu mengulangunja.

Pasal 17.

Izin ini dapat berupa peraturan umum jang memper- kenankan impor dan ekspor Rupiah dalam batas-batas tertentu dan dengan sjarat-sjarat tertentu, misalnja untuk memungkinkan melakukan pembajaran pembajaran pada waktu masuk diwilajah Indonesia. Izin ini dapat djuga bersifat khusus atau insdentil.

Pasal 18.

Sistim ini sangat berlainan dengan sistim jang dipakai dalam Deviezen-ordonnantie 1940. Dalam deviezen-ordon- nantie dinjatakan dapat dipidana semua perbuatan-per- buatan jang bertentangan dengan peraturan-peraturan jang dikeluarkan berdasarkan Ordonnantie tersebut (jang dimaksudkan ialah peraturan-peraturan dalam Deviezen- verordening dan dalam surat-surat edaran L.A.A.P.L.N.), Ini jang disebut suatu "Blanket-norm". Sebelum diru- muskan persis apa perbuatannja jang terlarang atau di- haruskan, telah dinjatakan dapat dipidana.

Tidak dibedakan djuga apakah peraturan-peraturan itu bersifat penting dan essensial ataukah hanja bersi- fat detail dan administratif sadja, misalnja berapa lembar dari suatu formulir harus dibuat dan sebagainja. Semua itu dapat dipidana. Dalam sistim baru dinjatakan dengan djelas tindak mana jang diantjam dengan pidana dan dipandang "strafwaarding".

Djika tidak dinjatakan bahwa suatu tindak bersifat pi- dana, maka tindak itu masuk lapangan hukum adminis- tratif cq perdata.

Pasal 19.

Sebagian besar dari hukum devisa merupakan hukum administratif jang dilaksanakan diluar pengadilan pidana dan perdata.

Dalam keadaan demikian dirasakan perlu bahwa inter- pretasi tertinggi dalam soal-soal devisa berada ditangan Dewan jang mempunjai tanggung djawab dalam bidang tersebut dan djuga berada dalam posisi jang terbaik untuk mempertimbangkan seluruh aspek finansial, mone- ter dan ekonomi dari perundang-undangan devisa. Ada kemungkinan bahwa suatu tindak pidana dalam lapangan devisa oleh pihak kedjaksanaan diberi arti jang berlebih- lebilhan, djauh diluar proporsi kalau ditinjau dalam hubungan neratja pembajaran dan lalu lintas pembajaran luar negerl seluruhnja.

Dewan dan alat-alatnja berada dalam posisi untuk me- nindjau hubungan dan "scope" ini dengan lebih sak- sama.

Djuga ada kemungkinan bahwa dengan dihukumnja suatu perbuatan timbul akibat-akibat lain dalam masjarakat (perdagangan) jang lebih merugikan bagi devisa Negara, sehingga menuntut berarti lebih merugikan daripada tidak menuntut. Oleh karena itu kepada Dewan diberi wewenang untuk dalam hal-hal jang demikian mengusulkan kepada Menteri/Djaksa Agung untuk tidak menuntut.

Pasal 20.

Sesuai dengan sistim jang didjelaskan diatas mengenai pasal 18 maka dalam pasal 20 s/d 24 ditetapkan dengan teliti tindak mana jang dipandang tindak pidana, jaitu tindak jang paling merugikan sadja untuk Negara dan masjarakat.

Jang terpenting ialah jang biasa disebut smokel (penjelundupan) dalam ekspor. Jaitu mengangkut barang keluar Indonesia dari peredaran dengan tidak menghiraukan pasal-pasal 7, 8 dan 9 sehingga hasil devisanja sama sekali tidak dapat dikuasai oleh Negara.

Kalau ini dilakukan dengan sengadja sedang kerugian jang dapat diderita oleh Negara besarnja melebihi suatu djumlah valuta asing jang merupakan nilai lawan 8886.71 gram emas murni, jaitu pada dewasa ini misalnja US.\$ 10.000 DM. 40.000,— atau pada umumnja Nilai Transaksi Rupiah (devisa) 2.500.000,—, pidana pendjara 10 tahun, atau denda Rp. 100 djuta. Kalau djumlahnja sama dengan nilai lawan 88.8671 gram emas murni (devisa ini Nilai Transaksi Rupiah 25.000) kebawah, maka tindaknja dipandang administratif. Djika semua peraturan ekspor ditaati tetapi ekspornja sebagian atau seluruhnja tidak dilangsungkan atau suatu djangka waktu tidak tepat, tindak ini hanja merupakan pelanggaran administratif oleh karena barang ekspornja tidak hilang dan masih tersedia untuk diekspor lagi. Pelanggaran dalam pemberian djasa keluar negeri, hanja mungkin kalau Dewan telah menetapkan djasa-djasa mana jang taripnja harus dibayar dalam devisa dan sampai mana hasilnja harus diserahkan kepada Dana Devisa. Dalam hal ini dapat ditjatat bahwa industri djasa-djasa kita belum begitu berkembang sehingga dapat menghasilkan djumlah-djumlah devisa jang besar.

Pasal 21.

Dalam hal impor, soalnja adalah berlainan. Kalau ekspor smokkel jang berhasil berarti kehilangan devisa untuk Negara, maka impor setjara selundup tidak membebani Dana Devisa, sebab tanpa izin tidak mungkin (diam-diam) devisa dikeluarkan dari Dana Devisa.

Maka dari itu pelanggaran pasal 12 hanja merupakan pelanggaran administratif.

Djika peraturan-peraturan Bea dan Tjukai jang diselundupi dalam peraturan-peraturan itu sendiri telah tjukup peraturan-peraturan pidana jang mendjaganja.

Pasal 22.

Tjukup djelas.

Pasal 23.

Tjukup djelas.

Pasal 24.

Tjukup djelas.

Pasal 25.

Peraturan-peraturan ini mengenai soal pertanggungjawaban djika suatu tindak dilakukan oleh suatu badan hukum. Pada umumnja peraturan-peraturan ini sesuai dengan peraturan-peraturan dalam Undang-undang tindak pidana ekonomi (Undang-undang No. 7 Dst tahun 1955).

Pasal 26.

Tjukup djelas.

Pasal 27.

Tjukup djelas.

Pasal 28.

Mengadakan perdjandjian atau membuat kontrak jang tidak atau belum d;setudjui oleh Menteri Urusan Bank Sentral cq Biro cq Bank Indonesia tidak dengan sendirinja merupakan tindak pidana.

Akibatnja bahwa dalam perkara perdata perdjandjian itu akan diabaikan oleh hakim dan djuga bahwa Dana Devisa dan Negara tidak terikat oleh perdjandjian semacam itu.

Pasal 29.

Tjukup djelas.

Pasal 30.

Tjukup djelas.

Pasal 31 ayat 1.

Tjukup djelas.

ayat 2 :

Tjukup djelas.

Selainnja dari itu perlu ditjatat bahwa perbuatan-perbuatan jang membutuhkan izin adalah djauh lebih dikit daripada menurut Deviezen-ordonnantie.

ayat 3 :

Pembebasan umum dapat berbentuk peraturan khusus jang menjimpang dari Undang-undang ini. Misalnja untuk mengeluarkan atau memasukan barang pindaian barang hadiah dan sebagainja.

Sekalipun formulirnja djuga merupakan ekspor impor Dewan dapat mengeluarkan peraturan khusus jang merupakan pembebasan-pembebasan.

ayat 4 :

Dalam prakteknja delegasi ini akan dilakukan utama kepada Menteri Urusan Bank Sentral jang dapat mendelegasikan lagi kepada Bank Indonesia dan Biro.

Pasal 32 s/d 34.

Tjukup djelas.

Buku jang bermanfaat sekali untuk Sdr. miliki :

TRADE DIRECTORY OF INDONESIA 1964/1965

Tebal : 752 halaman
Kertas : Kuntsdruk
Harga : Rp. 15.000.— per buku

Pesan pada : DIREKTORAT MARKETING DAN RESEARCH
Djl. Tanah Abang Timur 87, DJAKARTA.

PENETAPAN HARGA PENJERAHAN BARANG² EKSPOR GOLONGAN II

(Berlaku Dari Tgl. 27 September s/d 9 Oktober 1965)
Pengumuman BLLD No. 59/HP/65. Tgl. 25 - 9 - 1965

COPAL MALENGKET PER KWINTAL.

kwaliteit P.W.S.	Nf. 73,—
kwaliteit M.A.P.	Nf. 62,—
kwaliteit W.S.	Nf. 65,—
kwaliteit W.S. (Batjan)	Nf. 53,—
kwaliteit L.A.S.	Nf. 31,—
kwaliteit M.A.	Nf. 21,—
kwaliteit M.B.	Nf. 8,—

COPAL LOBA PER KWINTAL.

kwaliteit A	Nf. 71,—
kwaliteit B	Nf. 64,—
kwaliteit C. 1	Nf. 61,—
kwaliteit C. 2	Nf. 53,—
kwaliteit D.	Nf. 50,—
kwaliteit D.B.B.	Nf. 46,—
kwaliteit E	Nf. 43,—
kwaliteit I	Nf. 39,—
kwaliteit Dust	Nf. 11,—

KULIT KERBAU INTERMEDIATE PER KWINTAL.

berat 8 — 10 kg	DM. 210,—
berat 10 — 13 kg	DM. 164,—
berat 13 — 16 kg	DM. 221,—
berat 16 — 20 kg	DM. 229,—
berat 20 — up	DM. 223,—

KULIT KERBAU SECONDS PER KWINTAL.

berat 8 — 10 kg	DM. 162,—
berat 10 — 13 kg	DM. 164,—

KULIT KERBAU PICKERS PER KWINTAL.

berat 8 — 10 kg	DM. 119,—
berat 10 — 13 kg	DM. 123,—
berat 13 — 16 kg	DM. 129,—
berat 16 — 20 kg	DM. 138,—
berat 20 — up	DM. 148,—

KULIT KAMBING UKURAN 70 — 100 CM FIRST PER LEMBAR.

berat average 34 kg (per 100 lembar) Br. pence	57
berat average 37 kg (per 100 lembar) Br. pence	60
berat average 40 kg (per 100 lembar) Br. pence	63
berat average 50 kg (per 100 lembar) Br. pence	74
berat average 60 kg (per 100 lembar) Br. pence	84
berat average 65 kg (per 100 lembar) Br. pence	89
berat average 70 kg (per 100 lembar) Br. pence	75

KULIT KAMBING UKURAN 70 — 100 CM SECONDS PER LEMBAR.

berat average 34 kg (per 100 lembar) Br. pence	47
berat average 37 kg (per 100 lembar) Br. pence	50
berat average 40 kg (per 100 lembar) Br. pence	53
berat average 50 kg (per 100 lembar) Br. pence	61

berat average 60 kg (per 100 lembar) Br. pence	69
berat average 65 kg (per 100 lembar) Br. pence	75
berat average 70 kg (per 100 lembar) Br. pence	79

8. KULIT GIBAS UKURAN 70 — 100 CM FIRST PER LEMBAR.

berat average 50 kg (per 100 lembar) Br. pence	53
berat average 60 kg (per 100 lembar) Br. pence	63
berat average 70 kg (per 100 lembar) Br. pence	74

9. KULIT GIBAS UKURAN 70 — 100 CM SECONDS PER LEMBAR.

berat average 50 kg (per 100 lembar) Br. pence	44
berat average 60 kg (per 100 lembar) Br. pence	53
berat average 70 kg (per 100 lembar) Br. pence	61

10. KOPI ROBUSTA PER KG.

EK. I	DM. 1,31
EK. II	DM. 1,25
EK. III	DM. 1,20
20/25%	DM. 1,17
AP. I	DM. 1,34
AP. II	DM. 1,19
G.B. 10/12%	DM. 1,20
JAVA W.I.B./I	DM. 1,91

11. KOPI ARABICA PER KG.

Sumatera/Sibolga D.P.	DM. 2,73
Java W.I.B./I	DM. 3,52
Java W.I.B./SUP	DM. 3,70
Sulawesi Rantepao D.P.	DM. 3,38
Sulawesi Kalosi D.P.	DM. 3,78
Sulawesi Rantepao Triage	DM. 2,02
Sulawesi Kalosi Triage	DM. 2,27

12. COCOABEANS PER KG.

kwaliteit A	DM. 2,88
kwaliteit B	DM. 2,73

13. PALA KUPAS PER KWINTAL.

Siauw ABCD	DM. 440,—
Siauw Rimpel	DM. 410,—
Siauw BWP	DM. 331,—
Papua ABC	DM. 336,—
Papua BWP	DM. 277,—

14. PALA KUPAS MENADO — TAGULANDANG — SANGIR BESAR — AMBON DAN TERNATE (BUKAN SIAUW) PER KWINTAL.

ABCD	DM. 418,—
Rimpel	DM. 390,—
BWP.	DM. 315,—

15. PALA PADANG BIDJO SARING PER KWINTAL	US\$. 90,—	25. AMPAS TAPIOCA PER KWINTAL (KADAR PA MAX. 73%)	
16. PALA PADANG PER KWINTAL	US\$. 47,—	ampas tapioca	DM. 4,—
17. BUNGA PALA PER KWINTAL.		tepung ampas tapioca	DM. 5,—
Siauw I	DM. 578,—	26. GAPLEK PER KWINTAL (KETJUALI LAMPUN gaplek gelondong	DM. 1,—
Siauw Gruis I	DM. 554,—	tepung gaplek	DM. 1,—
Siauw II	DM. 533,—	27. TEPUNG TAPIOCA PER KWINTAL.	
Siauw Gruis II	DM. 510,—	kwaliteit AAA	E.£. 12/1
Papua I	DM. 415,—	kwaliteit AA	E.£. 11/6
Papua Gruis I	DM. 397,—	kwaliteit A	E.£. 10/6
Papua II	DM. 378,—	28. PINANG PER KWINTAL (BUKAN PINANG ATJEH).	
Papua Gruis II	DM. 363,—	sliced kwaliteit I	DM. 2,—
18. VANILI PER KG.		kwaliteit II	DM. 2,—
kwaliteit ABC	US\$. 5,21	kwaliteit III	DM. 1,—
kwaliteit cuttings	US\$. 4,49	splits kwaliteit I	DM. 2,—
kwaliteit loose-cuts	US\$. 4,49	kwaliteit II	DM. 1,—
19. COPRA CAKES/CHIPS PER KWINTAL (KADAR MINJAK MAX. 15%).		bulat putih	DM. 1,—
copra cakes	DM. 16,—	bulat merah	DM. 1,—
copra chips	DM. 17,—	29. HEWAN HIDUP PER EKOR.	
ground telquel chips/cakes	DM. 16,—	sapi ex Bali	HK\$. 1,—
20. MINJAK ETERIS PER LB.		sapi ex Banda Atjeh	HK\$. 1,—
minjak sereh minimum 85/35%	Br. pence 35	sapi ex Lombok	HK\$. 1,—
minjak nilam kwaliteit I	Br. pence 164	sapi ex Sumba	HK\$. 1,—
minjak nilam kwaliteit II	Br. pence 151	sapi ex Timor	HK\$. 1,—
minjak cananga ester 20 up	Br. pence 174	sapi ex Djawa Timur/Surabaja	HK\$. 1,—
minjak akar wangi	E.£. 1/17,—	sapi ex Madura	HK\$. 1,—
minjak kaju tjendana	Br. pence 136	kerbau ex Bali	HK\$. 1,—
21. KATJANG TANAH KUPAS PER KWINTAL.		kerbau ex Banda Atjeh	HK\$. 1,—
m e r a h	DM. 55,—	kerbau ex Sumbawa Besar	HK\$. 1,—
p u t i h	DM. 64,—	kerbau ex Lombok, B.ima, Sumba, Flores	HK\$. 1,—
22. KATJANG TANAH BERKULIT PER METRIC TON	US\$. 90,—	kerbau ex Djawa Timur/Surabaja	HK\$. 1,—
23. INDIUK DIPILIH DIPOTONG BASIS STANDARD 30/90 CM. per metric ton E.£. 210/9/6		kerbau ex Sulawesi Selatan	HK\$. 1,—
24. BIDJI KAPOK PER METRIC TON.		babi	HK\$. 1,—
in bulk	E.£. 12/2/1	30. GAMBIR PER KWINTAL.	
in bags	E.£. 14/5/3	gambir kembang No. 1	E.£. 12/1
		gambir bulat	E.£. 11/6
		gambir persegi hitam (extrac)	E.£. 10/6
		31. DJAGUNG PER METRIC TON.	
		kuning/putih	US\$. 1,—
		m e r a h	US\$. 1,—

Mengikuti dan berlangganan majalah WARTA PERDAGANGAN berarti anda dapat mengikuti serta mengamalkan dengan baik Keb'djaksanaan Pemerintah di bidang Perdagangan.



Perusahaan
NIAGA NEGARA

P. N. PEMBANGUNAN NIAGA I

Kantor Pusat: Hajam Wuruk No. 127 Djakarta

Telepon No. O.K: 21401 - 02 - 03

Melaksanakan Triprogram Pemerintah, dalam bidang perdagangan tehnik.

1. Impor/Distributor :

Bahan baku; bahan bangunan; Obat²an pharnasi; bahan² kimia tehnik; mesin² kimia tehnik; mesin² perkebunan/pertanian; mesin² industri ringan/berat; mesin² logam/kaju; grafika; alat² besar & Road rollers; mesin² diesel & tenaga penggerak utama arus lemah; arus kuat; mesin² sandang (pemintalan, peradjudan, pertenenan, Finishing & printing).

2. Export/interinsulair :

Karet, kopra, hasil² bumi dan barang²tehnik.

3. Pembangunan projek² :

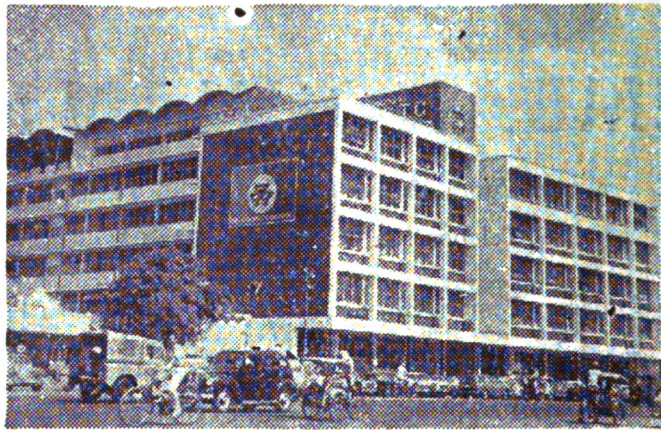
Perentjana & pelaksana; melengkapi; reparasi & revisi, Projek² umum dan industri.

Tjabang² Utama : Djakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan.
Tjabang² biasa : Palembang, Padang, Banda Atjeh, Makasar dan Manado.
Sub. Tjabang : Tjirebon
Perwakilan di luar Negeri: Tokyo, Amsterdam dan Manila.

EXPORTERS



**RUBBER-COPRA-COPRA CHIPS /
CAKES - PEPPER - COFFEE -
NUTMEGS - CASSIA VERA
MANIOC MEALS - TALLOW SEEDS
RATTAN - etc**



IMPORTERS



**TEXTILES-DYE STUFFS-RAW COTTON
STAPLE FIBRE
PAPER - STATIONERY
WHEAT FLOUR
FERTILIZERS & OTHER CHEMICALS
IRON & STEEL PRODUCTS
BUILDING MATERIALS
MACHINERIES-TOOLS & SPARE PARTS**

P_n PANTJA NIAGA



WARTA



Perdagangan

RECEIVED

NOV 11 1966

AP
W299
P433
18
13



TAHUN KE - XVIII

1965

MADJALAH
„WARTA PERDAGANGAN”

Terbit tiap 2 Minggu sekali

Diterbitkan oleh :

Departemen Perdagangan Dalam Negeri beserta Urusan Perdagangan Luar Negeri dari Kompartimen Luar Negeri/H.E.L.N. dan Perdagangan Luar Negeri.

Pelindung :

J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/
Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri
BRIG. DJENDERAL A. JUSUF

Pemimpin Umum :

Kepala Direktorat Marketing dan Research
Ir. J.J. Pitoy M.A.

Staf Redaksi :

Staf Direktorat Marketing dan Research.

Penanggung Jawab :

Kepala Seksi Publikasi Madjalah
Anwar B. Harahah.

Pembantu Khusus :

Kolonel Usman Ismail — Alamsjah S.B.P. —
R.H. Tuwaidan M.A. — Drs Sjaaf Muchtar —
Major Drs Sukadjat — R. Isa — Budhiman
B.A. — Drs A. Aidit — Suprpto — Sudjadi
— A. Karim Usman S.H.

Alamat Redaksi dan Tata Usaha :

Madjalah "WARTA PERDAGANGAN"
Direktorat Marketing dan Research
Djl. Tanah Abang Timur No. 87,
D J A K A R T A.

Pelaksana/Pertjetakan :

Kepala Pertjetakan P.N. Karya Tjotas
Burdi Reksodirdjo.

Pembayaran uang langganan dilakukan dimuka dengan :

1. Penjetoran atas Rekening Madjalah Warta Perdagangan Kode No. KB/WA/-194, pada Bank Negara Indonesia Unit I Djl. Thamrin, Djakarta.
2. Dinas Giro dan Tjek Pos atau dengan pos wesel jang langsung dialamatkan kepada Tata Usaha Warta Perdagangan Direktorat Marketing dan Research.

Daftar Isi :

Halaman

1. Penjelesaian politik serahkan pada saja ...
2. Suatu ulasan mengenai peristiwa petualangan G-30-S
3. Konfrontasi ekonomi terhadap nekolim Malaysia-Singapura harus lebih digelorakan & ditingkatkan
4. Pernyataan Belasungkawa
5. Instruksi¹/Seruan Menteri Perdagangan ... 1
6. Ketentuan² mengenai pemasaran hasil³ industri, kerajinan tangan dan barang² golongan III jang tidak termasuk dalam daftar pengumuman BLLD
7. Beberapa aspek perdagangan Luar Negeri 1
8. Kewajiban pendaftaran untuk Perwakilan² Perusahaan² Asing di Indonesia
9. Kapas dan hubungannya dengan Industri Pemintalan dan Peradjudan di Indonesia ... 2
10. Perdagangan Luar Negeri Jugoslavia dan Kedudukan Export-Commodities Indonesia dipasaran Jugoslavia
11. Memperkenalkan : Republik Niger

Keterangan gambar kulit muka :

I S T A N A B O G O R

IZIN TERBIT :

Keputusan Menpen No. 00231/R/SK/DPH/SIT/'65 tgl. 3-9-1965, dan

Keputusan Peperda Djakarta Raya dan Sekitarnya No. Kep. 037/P/X/65, No. Urt. 5 tgl. 21-10-1965

„PENJELESAIAN POLITIK SERAHKAN PADA SAJA”

Presiden/Pemimpin Besar Revolusi akan meruskan penyelesaian politik dari persoalan yang timbul sebagai akibat dari apa yang dinamakan „Gerakan 30 September” atas dasar fakta² yang nyata dan tidak berdasarkan pembakaran² dari pihak manapun.

Keterangan ini diberikan oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi hari Kamis pagi tanggal 14 Oktober 1965 kepada ketua dewan pimpinan LKBN AN-ARA, Moh. Nahar, di Istana Merdeka. Ini adalah wawancara pertama yang diberikan oleh Presiden Sukarno kepada pers sedjak terdjadinja petualangan antara revolusioner „Gerakan 30 September”.

Atas pertanjaan apakah P.J.M. Presiden Pemimpin Besar Revolusi sudah mendapatkan perumusan penyelesaian politik daripada persoalan yang timbul karena „Gerakan 30 September”, Presiden/

Pemimpin Besar Revolusi menjawab : „Laat dat maar aan mij over. Wait and see !” (Serahkanlah itu padaku. Tunggulah).

Beliau segera pula menambahkan, bahwa penyelesaian politik itu akan beliau dasarkan atas dasar „real facts” dan tidak atas dasar pembakaran² dari pihak manapun djuga.

Menurut keterangan² yang diperoleh wartawan ANTARA, Presiden/Pemimpin Besar Revolusi sedjak terdjadinja apa yang dinamakan „G-30-S” itu terus-menerus sibuk dan hanja waktu istirahat yang sangat terbatas mengadakan pertukaran fikiran dan pembitjaraan² dengan para menteri pembantu² beliau serta pimpinan Angkatan Bersendjata dan pembesar² dan pemimpin² lainnja untuk membitjarkan masalah pemerintahan sehari², agar supaja segala sesuatu berdjalan lantjar dan normal.

„Antara”.



Sidang Paripurna Kabinet Dwikora pada tgl. 6 Oktober jbl.

(Foto : Deppen).

Suatu Ulasan Mengenai Peristiwa Petualangan G.30.S

Indoktrinasi J.M. Menko/Ketua Panitia Pembina Djiwa Revolusi Dr. H. Roeslan Abdulgani didepan para peserta rapat kerdja Kepala² perwakilan dalam/luar negeri dari P.N. Garuda jang mengulas peristiwa petualangan G — 30 — S, kami muatkan setjara lengkap dibawah ini.

I. KATAPENGANTAR.

1. Peristiwa Petualangan kontra-revolusi G — 30 — S jbl. merupakan suatu "set-back ... bagi Revolusi kita. Lebih² bagi konsepsi Nasakom, hal mana sangat merugikan kesatuan dan persatuan Bangsa dari Sabang sampai ke Merauke.
2. Tetapi setjara dialektis peristiwa petualangan ini mengandung pula hikmah, jaitu bahwa Rakjat dan masjarakat kita sudah tinggi-kesadaran-politiknya itu — a.l. berkat indoktrinasi jang intensip dan extensip — dapat membedakan siapa² dalam kata-dan-perbuatan benar² revolusioner siapa² jang quasi-revolusioner, dan siapa² jang kontra-revolusioner.
3. Dengan lain perkataan Rakjat dan Masjarakat kita jang sudah Manipol-bewust tentu akan dapat me-njila²kan : siapa² jang berdjiwa Banteng, jaitu jang benar² setia dan berani membela Pantja Sila : siapa² jang berdjiwa domba, jaitu jang dengan gampang di-"adudombakan; dan siapa² jang berdjiwa serigala, jaitu jang tanpa achlaq dan moral menghasut dan menerkam Rakjat untuk kepentingannya sendiri.

II. PEM-BABAK-AN FASE DARI PERISTIWA PETUALANGAN G — 30 — S.

1. Agar supaya kita mempunyai pegangan jang teguh dalam melandjutkan Revolusi-Nasional kita, maka perlu kita menjadari adanya fase² dalam peristiwa petualangan ini.
2. a. Fase pertama jalah dimulai pada 1 Oktober djam 4.00 pagi dengan teror dan Pengumuman tentang adanya „Gerakan 30 September” sampai djam 14.15 siang.
b. Fase kedua jalah dimulai dengan Pengumuman tentang pembentukan „Dewan Revolusi”, wewenang dan susunannya sampai tanggal 3 Oktober djam 1.30 malam.



J.M. Menko Hubra/Ketua Panitia Pembina Djiwa Revolusi Dr. H. Roeslan Abdul Gani.

- c. Fase ketiga jalah dimulai dengan Pidato Radio P.J.M. Presiden tgl. 3 Oktober djam 1.30 malam sampai Sidang Kabinet Perdana di Bogor pada tgl. 6 Oktober.
- d. Fase keempat jalah sesudah Sidang Kabinet di Bogor hingga sekarang ini.

Dalam fase-pertama situasi masih remeng². Banjak tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjdjadi. Tetapi bagi orang yang kesadaran-politiknya sudah matang, tentu akan dapat menangkap bahwa Pengumuman G — 30 — S. dengan tuduhan adanya „Dewan-Djenderal” yang akan mengadakan coup terhadap Presiden kita adalah tidak memuaskan dan me-jakinkan hati dan pikiran seorang yang sudah banjak makan „garam revolusi”.

Fase kedua dengan Dewan Revolusi yang menjatakan dirinya sebagai sumber kekuasaan. Negara, yang tidak memberi tempat sedikit-pun kepada Bung Karno, dan yang mende-misionerkan Kabinet Sukarno, adalah terang²-an merupakan suatu coup d’etat terhadap Presiden/Pemimpin Besar Revolusi kita. Perbuatan demikian jaitu menjinkirkan Bung Karno selaku Kepala Negara, Kepala Peme-rintahan, Panglima Tertinggi Angkatan Pe-rang, Pemimpin Besar Revolusi dan Mandat-aris MPRS, dengan didahului pentjulikan/Pembunuhan terhadap pimpinan A.D., adalah perbuatan kontra-revolusioner. Lebih² lagi dimana kita sedang berada dalam konfrontasi melawan „Malaysia”.

Fase ketiga diliputi oleh Amanat Bung Karno untuk mentjiptakan suasana tenang dan tertib, sambil mendjaga djangan sampai ada bentrokan fisik antara kita sama kita, dan untuk tetap mempertinggi kewaspadaan dan kesiap-siagaan dalam rangka meningkat-kan pelaksanaan Dwikora.

Fase ke-empat didjwai dan dipimpin oleh kepegasan P.J.M. Presiden kita, bahwa :

- a. kita djangan sekedjap mata-pun lupa akan adanya bahaya yang „latent” jaitu serangan pihak Nekolim, djustru diwaktu kita men-galami kelemahan akibat krisis pertent-angan antara kita sama kita.
- b. apabila ada serangan dari pihak Nekolim, maka yang harus kita gerakkan dengan se-gera adalah AURI kita, untuk dapat mem-berikan pukulan balasan segera.
- c. karenanja harus ditjegah bentrokan antar-ABRI umumnja, khususnja bentrokan an-tara AD dan AURI.

Dalam pada itu ditegaskan oleh PJM. Presi-den, bahwa beliau :

- a. mengutuk perbuatan terror yang kedjam itu terhadap Djenderal² AD kita.
- b. bahwa beliau tidak menerima begitu sadja apa yang diperbuat oleh Dewan Revolusi terutama untuk men-demisionerkan Kabi-net Dwikora.
- c. telah mengambil perintah tegas untuk me-ngambil tindakan terhadap :
- d. oknum² dalam AURI yang melatih or-mas² tertentu untuk keperluan membantu terror, dan tidak untuk keperluan kon-frontasi „Malaysia”.

2.) oknum² dalam AD, terutama dalam bat. 454, bat. 530, dan Tjakrabirawa yang ter-sangkut dalam terror dan petualangan G — 30 — S.

- d. telah memerintahkan untuk mem-breidel sk² yang memuat pengumuman G — 30 — S dan Dewan Revolusi, seperti sudah ter-djadi dengan Harian Rakjat, Warta Bhak-ti, Bintang Timur.
5. Dalam pada itu Presiden menjerukan dan meminta dengan sangat djangan sampai kita dalam menghadapi „schok” atau kegontjan-gan dalam Revolusi kita dewasa ini kehilangan akal dan kepala dingin kita. Djangan kita ter-lalu emosional, dan terlalu terpukau, sehingga sama sekali „de kluts kwijt” (kehilangan akal), dan tidak tahu djalan untuk menjele-saikan petualangan kontra-revolusioner G — 30 — S, dan melandjutkan Revolusi kita.

III. APA JANG HARUS DI-AMBEG-PARA-MA-ARTAKAN

1. PEMULIHAN JANG BERSANGKUTAN DENGAN G — 30 — S.

- a. Dari kedjelasan² PJM. Presiden diatas, ma-ka yang per-tama² harus diusahakan bersa-ma jalah mentjiptakan satu suasana yang tenang dan tertib, untuk mentjegah segala kemungkinan bentrokan sendjata antar AB RI umumnja, AD-AURI khususnja.
- b. Ini tidak berarti, bahwa usaha penumpasan terhadap petualang kontra-revolusioner G — 30 — S dilunakkan atau dihentikan. Sama Sekali tidak. Hal ini adalah njaja dalam Amanat PJM Presiden tgl. 3 Oktober yang memerintahkan kepada Maj. Djenderal Soe-harto untuk melaksanakan pemulihan kea-mana dan ketertiban jg. bersangkutan dgn. peristiwa 30 September, sesuai dengan ke-bidjaksanaan yang telah digariskan oleh PJM Presiden. Malahan dengan terang-tangkapnja sebagian besar dari gembong²-nja, akan lebih djelas nanti bagi Rakjat dan Masjarakat siapa dalang²nja dan an-tek²nja dari petualangan kontra-revolusio-ner ini.

2. OORLOGS — ETIK ISLAM

- a. Dalam menanggapi tuntunan Hati Nura-ni seluruh Rakjat dan Masjarakat kita dewasa ini untuk Keadilan dalam masalah petuangan kontra-revolusi dewasa ini, PJM Presiden menegaskan akan berpe-gang teguh kepada „oorlogs-etik Islam” yang pernah beliau kupas dalam artikelnja tentang : „Bloedtransfusi” ditulis di Beng-kulu pada th. 1941 (dihimpun dalam Diba-wah Bendera Revolusi hal. 501 dts).

- b. Berpegangan pada ayat 109 dari Al-Baqarah yang berbunyi „Perangilah diatas djalan Allah orang² yang memerangi kamu, dan djanganlah meliwati batas. Sesungguhnya Allah tidak mentjintai orang yang meliwati batas”, maka Bung Karno ingin menundukkan bahwa oorlogs-etik Islam adalah “tidak biadab, tidak primitif tidak mentah”, melainkan “adalah berisi budi yang halus”. Djuga dalam menghadapi terror dan kontra-revolusinja G — 30 — S dengan Dewan Revolusinja itu tegas Bung Karno, yang kita kenal sebagai orang yang ber-Taqwa, akan selalu mendjundjung tinggi dan melaksanakan keadilan, karena Keadilan mendekatkan orang pada Taqwa, dengan peringatan djangan “meliwati batas”.

3. DJANGAN BALAS-DEMDAM, TINGKAT KAN KE-IMANAN, KE-ICHSANAN DAN KE-ISLAMAN.

- a. Sjukur Alhamdulillah, pegangan PJM Presiden kita dalam masalah ini adalah boleh dikatakan tjotjok dengan apa yang kini hidup dalam hati sanubari sebagian besar daripada rakjat dan masjarakat kita. Pada umumnja Rakjat dapat mengendalikan nafsu balas dendam. Dalam krisis ke-bathinan yang maha hebat dewasa ini, akibat terrornja kontra revolusi G — 30 — S. Pemimpin² Rakjat dan Masjarakat berdjung keras untuk mengendalikan balas dendam, dan meningkatkan djiwa Rakjat kita kearah keimanan dan keichsanan dan keislaman kita semua yang lebih mendalam dan lebih kokoh lagi. Memang disana-sini emosi masih me-luap², yang dapat “meliwati batas”. “Melewati batas” dalam arti yang dapat menimbulkan bahaya baru, jaitu bahwa usaha PJM Presiden untuk memulihkan persatuan dan kesatuan bangsa, sebagai landasan pokok bagi kelanjutan penyelesaian revolusi kita, dapat dipersulit dan digagalkan.
- b. Dalam menghindarkan kemungkinan timbulnja “bahaja baru” ini, kita sekali-kali tidak boleh lengah akan adanja bahaya yang melekat pada kontra revolusi sekarang ini, dan penumpasannja harus kita ambeg-parama-artakan.

IV. ASPEK LUAR NEGERI.

1. Tiap segi revolusi kita mempunyai dua aspek, jaitu aspek nasional dan aspek Internasional. Demikian pula masalah kontra revolusi G — 30 — S. dewasa ini. Segi nasionalnja sudah saja kemukakan diatas, yang njata sekali mempunyai akar, sasaran serta akibat yang sangat luas sekali. Karenanja, maka ptualang kontra revolusi seka-

rang ini tidak dapat dikatakan sebagai s intern Angkatan Darat atau intern Angkatan Bersendjata kita, melainkan soal nasional, seluruh revolusi kita, yang penyelesaian politiknya kita serahkan kepada PJM Presiden.

2. Adapun segi internasionalnja daripada peristiwa petualangan kontra revolusi dewasa ini ialah bahwa kaum nekolim sangat senang sekali melihat adanja pertentang dalam tubuh negara dan Bangsa kita, dewasa ini. Memang hal ini adalah sejajar dengan adagium mereka jaitu untuk selanjutnya “divide-et-impera” mengadu domba antara kita.
3. Sewaktu ex-let. kol. Untung mulai dengan pengumumannja tentang G — 30 — maka Radio dan Pers Nekolim menjerumuskan nada tepuk tangan. Mereka rupanja sangat senang sekali dengan adanja G — 30 — itu : lebih² suatu pembentukan Dewan Revolusi serta susunan keanggotaan diumumkan. Diwaktu suara Bung Karno pada tanggal 3 Oktober djam 1.30 maka kita siarkan melalui RRI, maka radio Inggris (Inggeris) yang pertama-tama memberikan tentang hal ini, tetapi dibubuhi dengan komentar, bahwa ahli — monitoring mereka tidak dapat memastikan apakah jikalau disiarkan itu suaranya Presiden kita disamping itu disiarkan, bahwa kemungkinan besar Presiden kita atau sudah dibunuh, atau dalam tahanan atau dalam keadaan sakit collapse. Tetapi sewaktu Presiden kita njata² dalam keadaan sehat wal afiat, memimpin sidang Paripurna di Bogor, maka nada propaganda dan psywar mereka jalah, bahwa Presiden Sukarno dikatakan paling sedikit mengetahui tentang akan adanja konflik terhadap pimpinan AD, dan malahan tinggal diam sadja. Memang bukan main rancu yang berbahaja sekali kini disebar²kan oleh pihak Nekolim, untuk mengadu domba kita sama kita, dan untuk memisahkan Presiden kita dari Rakjat dan dari Angkatan Bersendjata/Angkatan Darat khususnya. Disamping itu sasaran propaganda mereka ialah Bung Karno dan Komunisme, sambil membakar-bakar golongan Agama dan Nasionalis.
4. Sewaktu saja beberapa hari yang lalu menegaskan kejakinan saja kepada para wargawan luar dan dalam negeri, bahwa bangsa Indonesia dibawah pimpinan Bung Karno tentu akan dapat mengatasi situasi dewasa ini, maka kon’an keterangan ini oleh Radio² Australia dan Inggeris dikomentari dengan nada negatif, sebab Bung Karno melalui Djubirnja, jaitu s

mulai mengadakan konsepsi Nasakom telah gagal, dan kini Bung Karno berjuang mati-matian untuk menjelamatkan konsepsi yang heterogeen dan penuh dengan inner-antagonism itu.

Dan kini setelah terbukti, bahwa TNI/AD kita dapat mematahkan sembilah puluh pct, dari kekuatan kaum kontra revolusi, malahan dapat menangkap hidup² ex-overste Untung dan ex-Kol. Latif, maka dengan tjongkok Tengku Abdulrachman mengatakan, bahwa : "Malaysia ber-sama² dengan dunia bebas akan membantu Indonesia dengan sepenuh tenaga, kalau angkatan Darat Indonesia mengoper kekuasaan Negara, dan bersedia menghentikan konfrontasi terhadap Malaysia".

Bukan main djarum pemisahnja Nekolim itu untuk menimbulkan perpetjahan antara Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang dengan Angkatan Darat kita.

Tetapi se-tadjam² djarum pemisahnja kaum Nekolim, maka lebih tadjam adalah kewaspadaan revolusionernja pimpinan Angkatan Bersendjata kita dan TNI/AD chususnja. Sebab sedjak beberapa malam ini melalui RRI dan lain² komunikasi keluar negeri disiarkan oleh pimpinan AD/TNI hendaknja djangan "Malaysia" mentjaba-tjaba memantjing dair keruh, dengan berusaha memisahkan kesetiakawanan TNI/AD kita dan Rakjat kita dari Bung Karno. Dan djangan "Malaysia" ber-illusi kita akan menghentikan konfrontasi, sekalipun kita dewasa ini masih dalam operasi menumpas gerakan kontrarevolusi coup 30 September, Penegasan itu diachiri dengan kalimat : „politik dalam negeri atau luar negeri haruslah riil, harus njata. Bukan riil atas dasar ambisi atau oportunime. Tetapi riil atas dasar prinsip Pantja-Sila, jang progressip-kiri dan anti Nekolim.

Apabila kita melihat petualangan kontra-revolusi G — 30 S sekarang ini dalam hubungannja dengan situasi didunia Asia-Afrika, maka njata sekali bahwa Indonesia dewasa ini merupakan suatu mata dalam rantai kegontjangan², jang memang diinginkan oleh Kaum Nekolim. Kita mengetahui, bahwa sembojan kaum Nekolim adalah : "let Asians fight against Asians", "let Africans fight against Africans", dan "let Arabs fight against Arabs". Kita melihat bahwa strategi dan muslihat Nekolim ini telah dijalankan untuk menggagalkan KAA ke - II di Aldjazair untuk menimbulkan keretakan di Arab-Unity dengan keluarnja Tunisia dari Liga Arab, dan dengan digerakannja agresi India terhadap Pakistan. Dan karena Indonesia, dibawah pimpinan Bung Karno selalu paling tegas

men-sinjalir adanja politik divide-et-impera dari kaum Nekolim ini, maka sedjak beberapa waktu ditjobanja untuk mendjadikan Indonesia dan Bung Karno mendjadi sasaran-utama dari panah-subversinja kaum Nekolim. Dan kini hampir berhasil subversi kaum Nekolim itu untuk „let Indonesians fight against Indonesians". Tetapi berkat ketangkasan TNI/AD kita dengan bantuan Rakjat jang sudah Manipol-bewust, jang sudah tinggi kesadaran politiknya, dan sudah mendarah-daging djiwa Pantja-Sila dan djiwa Nasakomnja, maka usaha pemetjah-belah ini dapat kita batasi seminimal²nja.

V. BEBERAPA MASALAH JANG CHUSUS HARUS DIPERHATIKAN

1. Faktor² objektip dan faktor² subjektip.

Dalam mengusahakan tertjiptanja ketenangan dan ketertiban kembali, maka perlu diperhatikan adanja faktor² objektip dan subjektip. Jang dimaksud dengan faktor² objektip adalah fakta² dan kenjataan² jang riil menampakkan diri kepada kita, seperti timbulnja kontra-teror sebagai reaksi terhadap terror, timbulnja emosi anti — PKI jang me-luap², timbulnja suasana tegang antar-kita-sama-kita akibat tuduhan² serta matjam² desas-desus dan sebagainja. Jang dimaksud dengan faktor² subjektip adalah peranan kita masing², berlandasan ketenteraman-bahin untuk dapat kita pentjarkan kearah sekeliling kita masing², agar kita dapat mentjiptakan suasana tenang dan tertib seperti jang dikehendaki oleh PJM Presiden kita. Sekalipun kedua faktor itu saling djalin-mendjalin, tetapi kita harus pandai menjila-njilakan.

2. Masalah terror.

a. Faktor jang kini sedang menggelora disekitar kita ialah adanja reaksi terhadap terrornja G — 30 — S. Reaksi ini ada jang bersifat self-defence, tetapi djuga ada jang berbentuk kontra-terror. Kita mengutjapkan sjukur Alhamdulillah, bahwa bentuk seldefence djauh melebihi bentuk kontra-terror. Ini adalah menundjukkan hiduppnja etika dan „moral restraint" jang baik sekali.

b. Namun demikian, dewasa ini mendjadi pemikiran jang sangat serieus dikalangan pendidik dan kalangan sosiawan kita apa jang menjebabkan sekelompok ketjil dari bangsa kita mendjalankan terror jang sama sekali diluar peri-kemanusiaan pada pagi² tanggal 1 Oktober jang baru lalu? Pihak Nekolim mengedjek-nja sebagai termasuk salah satu tjorak Kepribadian Indonesia. Sekalipun kita tak usah melajani edjekan kaum Nekolim ini, tetapi toch perlu kita perhatikan dan kita selidiki bersama. Karena itu dari tempat ini saja menjerukan kepada semua ahli pendidik kita,

guru² kita, kaum rohaniawan, alim-ulama kaum sosiawan kita dan semua lapisan pimpinan Bangsa kita untuk mentjurahkan perhatiannya kepada masalah yang serius ini.

c. Saja pribadi tidak akan lekas² menghubungkannya terrornja G — 30 — S baru² ini kepada ideologi komunisme atau Marxisme; seperti djuga halnya saja tidak akan keburu-buru menghubungkannya terrornja DI/TII dengan ideologi Islamisme; terrornja Hitler kepada Nazi-isme; terrornja Nica dengan kolonialisme; sekalipun saja tahu dari pengalaman dan sedjarah bahwa kolonialisme sebagai anak-kandung dari imperialisme dan kapitalisme tidak segan² menggunakan terror; dan sekalipun saja tahu dari sedjarah bahwa Nazi-isme atau fascisme sebagai ideologi-nja „kapitalismus im Niedergang“, jaitu kapitalisme yang sedang menurun, tidak segan² menggunakan terror; sekalipun saja tahu djuga dari sedjarah zaman Perang Salib dan Zamannya Umar Khayam tentang adanya "Order of Assassins" barisan² pembunuh dari kaum Nizari-Ismaili. Sekali-sekali saja tidak hendak menutup mata saja terhadap bahaya² yang inhaerent ada pada ideologi², yang mengadjarkan : "het doel heilig de mid-delen", jaitu "tudjuan menghalalkan dan mengkeramatkan segala tjara dan djalan, tidak peduli bermoral atau tidak". Sekali² tidak Malahan saja melihat adanya bahaya latent untuk lekas menggunakan terror pada ideologi² yang mengingkari Sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa, dan Sila Peri-Kemanusiaan.

d. Tetapi menurut saja "prime mover" atau penggerak-pertama dan penggerak-utama dari pada terror adalah hasutan yang setjara sistematis dan programmatis di-"indoktrinasi"kan kepada segolongan ketjil dari masyarakat kita, dipilih terutama dari golongan² yang hidupnya dalam keadaan putus-asa, karena kekurangan materil. Setelah dibangkitkan kebentjiaan, kefanatikan, dan intoleransi sosial maka di "indoktrinasi"kan bahwa satu-nja "djalan keluar" dari segala kesulitan adalah terror, dan pembunuhan; pokoknja djalan anarcho-nihilisme, yang dipudja²nja sebagai "radikal dan revolusioner". Ditjarikan sasaran² yang tjotjok untuk melepaskan timbangan kebentjiaan dan kebusanan itu. Dan didalam mentjari sasaran² itu oleh dalang²-nja atau oleh "mastermind"nja ditjarikan golongan² yang harus disingkirkan, untuk membuka djalan guna keperluan "Machtsangreifung", "coup d'etat" atau "perebutan kekuasaan".

e. Karena itu dalam tiap terror ada segolongan yang tanpa mengerti duduknja perkara yang sebenarnya merupakan alat-belaka. Ada pula yang merupakan pelaksananya dan dalang-nja. Inilah yang merupakan orang² yang paling djahat dalam tiap terror umumnya, chususnja petualangan kontra revolusi G — 30 — S sekarang ini.

3. OKNUM² DAN ORMAS² PKI TERLIBAT

a. Masalah lain yang harus kita perhatikan bersama ialah terlibatnja beberapa ormas² PKI. Hal ini sudah djelas. Bukti² tentang terlibatnja ormas² dan oknum² PKI dalam hal ini bertimbun-timbun tidak hanya diinstansi² resmi, tetapi djuga ditangan orpol² dan ormas² lain, dan ditangan rakjat. Reaksi Rakjat dan Masyarakat terhadap fakta ini adalah hebat sekali. Hal ini dapat dimengerti, dan emosi-umum menjamakannya dengan Madliun-affair.

b. Bahwasanja hal ini merupakan suatu "setback" bagi konsepsi Nasakom, sudah saja djelaskan diatas tadi. Ada golongan² yang menuntut pembubaran PKI, ada yang tidak ingin mendahului „uitspraak" Presiden tentang masalah ini. Golongan kedua ini mendasarkan pertimbangannya untuk tidak menjulitkan Presiden kita. Resikonja ialah bahwa golongan ini dengan mudah dapat dituduh : bantji dan plintat-plintut.

c. Saja berpendapat bahwa sikap golongan yang kedua itu adalah sesuai dengan andjuran Presiden untuk mentjiptakan suasana tenang dan tertib, sambil menjerahkan keseluruhan penyelesaian politiknja kepada PJM Presiden kita. Golongan demikian itu bukan bantji atau plintat-plintut asal mereka tegas mengutuk G — 30 S itu sebagai petualangan kontra-revolusi, dan kerenanja ikut aktif membantu ABRI/TNI AD untuk membasmi G — 30 — S beserta antek²-nja dan dalang²-nja.

4. BANTU PRESIDEN LAHIR BHATIN SETIA ICHLAS DJUDJUR-DINAMIS

a. Masalah lain yang harus kita perhatikan setjara khusus pula ialah : ke-ichlasan kita semua untuk menjerahkan keseluruhan penyelesaian politiknja kepada Presiden kita. Ke-ichlasan ini bukan berarti bahwa kita bersikap passif, dan massa-bodoh, atau "Kadaver-Gehirsam", jaitu membebek seperti bangkai, sikap mana oleh Bung Karno sendiri dalam adjaran²nja dikutuk-nja. Melainkan sikap ke-ichlasan itu adalah sikap aktif dan dinamis, memberikan kepada Presiden kita segala fakta dan pertimbangan setjara djudjur agar penyelesaiannya benar² sesuai dengan garis-politiknja Bung Karno dalam memimpin Revolusi kita sekarang ini.

b. Hal ini tidak mudah bagi Presiden kita. Dan kita semua menjadari bagaimana beratnya beban-pikiran yang kini beliau pikul. Karena itu disamping kita memberikan segala bantuan kepada beliau dengan se-djudjur²nja dan dengan se-ichlas²nja, maka kita hendaknja selalu memanjatkan do'a kehadiran Tuhan Jang Maha Esa agar Presiden kita selalu dalam lindungan-Nja dan selalu diberi taufik dan hidajat, seraya kekuatan lahir dan bathin untuk dapat menjelenggarakan akibat²nja petualangan kontra-revolusi G — 30 — S dewasa ini.

IV. PENUTUP

1. Apabila kita sekarang setjara menjeluruh melihat peristiwa petualangan kontra-revolusi — 30 — S ini dalam segala aspeknya, maka adalah bahwa tersangkut didalamnya keselamatan Revolusi kita, keselamatan kesatuan dan kesatuan Bangsa kita, keselamatan Negara dan Rakjat kita, keselamatan Pantja Azimat kita. Oleh karena itu kita semua tidak boleh bersikap acuh tak acuh melainkan kita semua harus memusatkan segala pikiran dan tenaga kita utk. dapat mengatasi, sambil bertekad dan bersumpah : jangan se-kali² lagi terulang petualangan, penganiayaan, serta tragedi sematjam ini.

2. Dalam pada itu kita hendaknya terus meluaskan dan memperdalam ajaran² Pemikiran Besar Revolusi, Bung Karno kita, ber-tema-teral membina dan memperkokoh persatuan dan kesatuan Bangsa dari Sabang sampai Merauke untuk melawan Nekolim dan membangun sosialisme Pantja Sila. Kita harus terus meningkatkan dan memperkuat persendjataan-lahirijah persendjataan-rochanijah kita agar supaya kita dapat melawan Nekolim disegala tempat dan segala bidang, baik dibidang politik, sosial-ekonomi dan kebudayaan. Keseimbangan kesatuan dari pada unsur djasmanijah dan mental terdapat dalam ajaran Pantja-Sila kita dan jiwa Nasakom, jaitu djiwa-sintesenja setiap orang dan sosialis. Djiwa Nasakom demikian itu

patriot Bangsa jang sekaligus nasionalis, ber-aga-harus kita pupuk dan kita tingka-kan terus, jaitu djiwa patriot, jang gandrung dan mati²an ber-djoang dan beramal untuk membangun bersama-sama dengan Rakjat suatu masjarakat adil dan makmur, materiil dan spirituil, setjara ilmijah dan dengan djalan jang di-Ridhoi oleh Tuhan Jang Maha Esa. Djangan se-kali² kita melupakan ilmu, dan djangan se-kali² kita meninggalkan djalan Allah.

3. Khusus kepada para peugas² dari PN Garuda saja menjerukan hendaknya terus memupuk ajaran² Bung Karno itu diatas dasar dan landasan patriotisme jang menjala-njala-Njanjian "Garuda Pantja Sila" adalah njanjian jang penuh dengan djiwa patriotisme, jaitu tjinja Kepada Tanah Air sendiri. Karena itu Garuda² Indonesia, terbanglah se-tinggi² : Langit dan ruang-Angkasa. Tetapi ingat se-tinggi² setiap pesawat Garuda kita terbang, ia selalu harus kembali ke-landasannya jaitu Pantja Sila, hasil galian Bung Karno dari bumi Indonesia sendiri; ia selalu harus kembali mendarat ke pangkalannya, jaitu hati Nurani Rakjat Indonesia. Siapa jang melupakan Pantja Sila dan meng-ingkari Tanah Airnya sendiri, ia akan ditolak oleh Bangsa dan Rakjatnya sendiri, dan ia djuga akan dijenjahkan oleh Revolusi Nasional kita.

Sekian dan Terimakasih.

P.T. KAPOK INDONESIA

(PERUSAHAAN NEGARA)

PEMBELI, PENJUAL DAN EKSPORTIR TUNGGAL UNTUK HASIL
KAPOK INDONESIA

TURUT SERTA MEMBANTU PEMERINTAH DALAM MEMPERBESAR EKSPOR,
HASIL BUMI INDONESIA DEMI SUKSESJA REVOLUSI DALAM BIDANG
PEREKONOMIAN.

Kantor Pusat :

Djl. R. Patah 33, Semarang
Tilp. Sm. 668
Cable : PTKAPOK SEMARANG.

Tjabang Djawa Tengah :

Djl. R. Patah 33, Semarang
Tilp. Sm. 649 — 1780
Cable : KAPOK SEMARANG.

Tjabang Djawa Timur :

Djl. Radjawali 5, Surabaya
Tilp. U. : 3658 — U. 3682
Cable : KAPOK SURABAJA.

Perwakilan Tegal :

Djl. Diponegoro 34, Tegal
Tilp. 242
Cable : PERKAPOK TEGAL.

Perwakilan Makasar :

Djl. Kalimantan 88, Makasar
Cable : PERKAPOK MAKASAR.

Perwakilan Djakarta :

Djl. Teuku Tjhik Ditiro 46
Flat 18, Djakarta
Tilp. Menteng 702
Cable : PERKAPOK DJAKARTA

KONFRONTASI EKONOMI TERHADAP NEKOLIM MALAYSIA - SINGAPURA HARUS LEBIH DIGELORAKAN & DITINGKATKAN



*J.M. Menteri/Sekretaris Umum Staf K.O.T.O.E.
Brigjen Drs. Sukendro.*

Foto : DEPPEN.

Menteri/Kepala Staf KOTOE Brigjen Drs A. Soekendro telah menekankan seruannya, supaya dalam rangka meningkatkan perdjongan Dwikora dan menumpas „Gerakan Kontra Revolusi 30 September” dibidang ekonomi maka konfrontasi ekonomi terhadap Malaysia-Singapura chususnja, dan nekolim umumnja, lebih kita gelorakan dan kita tingkatkan.

Menteri Soekendro jang mengemukakan seruan tsb. dan ditudjukan kepada segenap petugas KOTOE serta masjarakat umumnja dalam pada itu menegaskan selandjutnja, bahwa semua projek konfrontasi, semua crash program dan operasi² ekonomi baik didaerah² perbatasan maupun digaris belakang, harus tetap berdjalan dan digiatkan semaksimal²nja. Semua petugas, harus mendjalankan tugas kewajibannja dengan semangat jang tinggi. Djustru pada waktu sekarang ini, kita tidak boleh lengah, sebab kelengahan akan menimbulkan kelemahan, dan kelemahan akan menjebabkan kekalahan. Oleh karena nja, kita harus selalu waspada terhadap setiap sia-sat, budjukan² dan tipumuslihat Nekolim. Demikian Brigjen Soekendro.

Lebih djauh melalui releasannja jang disampaikan kepada „Antara” Brigjen Soekendro lengkap berkata sebagai berikut : Perdjongan Dwikor banjak tergantung pada kekuatan dan ketahanan home front terutama dibidang ekonomi. Sebagai salah satu risiko untuk melaksanakan Trisakti I dikari dibidang Ekonomi, kita harus berani menderita karena kesulitan² ekonomi.

Keadaan ini telah dinjatakan pula dalam Amn Takari, dimana kita semua harus menerima kesulitan-kesulitan ekonomi sebagai keprihatinan. Tetapi kitapun mendapatkan suatu fakta, bahwa djuga dalam alam keprihatinan ini ada beberapa golongan masjarakat tertentu, jang dengan sengadja mengeksploitir kesulitan² ekonomi tersebut untuk melaksanakan maksud² politiknya. Segala usaha² kita untuk menanggulangi dan mengatasi kesulitan² ekonomi dan keuangan maka oleh golongan² tersebut sengaja dirongrong dan disabot, baik setjara terang² maupun setjara dibawah tanah. Surat² kabar jang menjadi terompetnja atau jang dapat diperalat, pada bulan² jang achir² ini sangat menjolok melantjarkan kampanye pemberitaan² jang menjerang kebidaksanaan Pemerintah c.q. KOTOE dibidang ekonomi. Kebidjaksanaan KOTOE dibidang sandang, pangan, dibidang perkopraan dan lain-lain telah didjadikan objek kampanye pemberitaan² berisi ketjaman² dan tuduhan² jang tidak objektif bahkan ada jang tidak lagi tertudju kepada soalannja, melainkan kepada perorangan. Demikian, maka public opinion hendak dipengaruhi dan dipaksa untuk membenarkannja, bahkan sengaja untuk „menghukumnja” tanpa tata-tjara hukum jang berlaku. Tjara² pemberitaan jang dipakai oleh golongan² tersebut mengingatkan kita akan tjara pers dizaman liberal dan taktik nekolim.

Sentimen rakjat „dipaksakan”, sampai ke demonstrasi² jang mendengungkan sembojan² mengadakan tuntutan² jang ultra revolusioner. Achirnja, dengan gagalnja „Gerakan Kontra Revolusi 30 September” serta coup „Dewan Revolusinja” baru lalu, terbangkarlah apa jang sebenarnya dibelakang kampanye tersebut.

Dengan telah terdapatnja bukti² dan dengan njanya pengakuan dari tawanan² Lobang Buaja, bahwa mereka telah „diperintahkan” untuk berdemonstrasi di Ibu Kota pada tanggal 29 September 1965 dengan dalih mengganjang kabir, pentjoleng² ekonomi setan² kota dan menuntut hukum mati, maka kampanye pemberitaan jang dilantjarkan sebelumnya merupakan satu pendahuluan dari gerakan kontrev 30 September. Dan kampanye ekonomi tersebut djuga merupakan tabir asap untuk membungkus maksud² politik jang sebenarnya. Kena

(bersambung ke hal...)

Pernyataan Belasungkawa

Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri beserta seluruh karyawan Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri dan BPU-NIAGA/Perusahaan Niaga Serta Unit² khususnya dan Jajasan/Lembaga jang ada dalam lingkungannya menjatakan turut berduka tjita sedalam-dalamnya atas gugurnja :

J.M. Menteri/Pangad. Let. Djen. A. YANI

Deputy II Men/Pangad. Maj. Djen. SOEPRAPTO

Deputy III Men/Pangad. Maj. Djen. HARJONO M.T.

Ass. I Men/Pangad. Maj. Djen. S. PARMAN

Ass. IV Men/Pangad. Brig. Djen. D.I. PANDJAITAN

Dir. Keh. AD/Oditur Djenderal Brig. Djen. SOETOJO SISWOMIHARDJO

Adjudan J.M. Menko Hankam/KASAB Lettu/CZI P. TENDEAN

dan korban-korban lainnja.

sebagai akibat perbuatan kaum kontra-revolusioner dari apa jang menamakan dirinja "Gerakan 30 September".

Semoga arwah para Pahlawan Revolusi tersebut mendapat tempat jang lajak di sisi Tuhan Jang Maha Kuasa.

Kepada keluarga jang ditinggalkan semoga Tuhan Jang Maha Pengasih dan Penjajang memberikan kekuatan dan ketabahan bathin.

Djakarta, 7 Oktober 1965.

**MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI/KUASA
MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

t.t.d.

A. JUSUF

Brigadir Djenderal TNI.

Instruksi² / Seruan Menteri Perdagangan

Dalam rangka usaha mempertinggi kewaspadaan dan kesiapsiagaan Nasional, chususnja unt membantu mentjiptakan suasana jang tenang dan tertib berhubung dengan adanja apa jang menamakan dirinja "Gerakan 30 September", maka dibawah ini kami sadjikan Instruksi² serta Seruan² Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri jang di'udjukan kepada Pembantu Menteri/Pegawai² dalam lingkungan Departemen Perdagangan baik dipusat maupun didaera para pengusaha chususnja dan masjarakat pada umumnja; sebagai berikut :

MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI/ KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

I N S T R U K S I

No. 032/MPDN/I/65.

- Kepada :**
1. Para Pembantu Utama. Kepala Direktorat/Sekum dalam lingkungan Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri.
 2. Para Direksi BPU - Niaga, P. N. N., Unit² Chusus, Lembaga dan Jajasan-jajasan.
 3. Para Kepala Perwakilan Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri diseluruh daerah Indonesia.

Guna melaksanakan amanat² P. J. M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi, chususnja mengenai usaha mempertinggi kewaspadaan dan kesiap-siagaan serta pemulihan keadaan berhubung dengan adanja apa jang menamakan dirinja "Gerakan 30 September".

Diinstruksikan untuk :

1. Mentjiptakan suasana ketenangan kerdja dilingkungan masing², agar perkerdjaan sehari² dapat dilaksanakan se-baik²nja dan sebagaimana mestinja, demi kelantjaraan pelaksanaan tugas Negara pada umumnja dan roda perdagangan pada chususnja.
2. Mengamankan segala sesuatu jang penting dan memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan masing².
3. Mengambil tindakan² tegas, tepat dan bidjaksana didalam lingkungan masing² terhadap segala anasir jang dengan apapun bersifat memetjah belah persatuan dan kesatuan, serta terhadap usaha pengatjauan dan perongrongan.
4. Mendjauhkan diri dari segala hasutan dan desas-desus, serta memperhatikan dengan saksama segala petunjuk dan ketetapan jang sudah/akan kami berikan.
5. Memberikan laporan tentang segala sesuatu dalam rangka pelaksanaan Instruksi ini.

Marilah kita bekerdja terus dalam rangka kebidjaksanaan umum Pusat dengan penuh kewaspadaan dan kesiap-siagaan, dan bina-lah persatuan dan kesatuan dengan menghindarkan perpetjahan antara kita sama kita

**MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI/KUASA
MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

t t d.

A. J U S U F

BRIG. DJENDERAL T. N. I.

MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI/ KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

SERUAN/INSTRUKSI NO. 033/MPDN/I/65.

1. Demi kepentingan kebutuhan masyarakat D.C.I. Djakarta Raya, dengan ini kami serukan kepada semua pengusaha/supplier/pengangkut² untuk tetap mendjalankan tugas masing² seperti sediakala.
2. Djaln² keluar/masuk D.C.I. Djakarta Raya aman dan bilamana ada pengontrolan maka hal itu diarahkan kepada oknum² kontra revolusi dan bukan ditujukan kepada para pengangkut barang. Para pengangkut barang jang bertugas mensupply D.C.I. Djakarta Raya tidak akan dipersukar.
3. Kepada semua pihak jang bergerak dalam sektor perdagangan kami serukan untuk membantu melantjarkan penjaluran barang² sebagaimana mestinja.
4. Kepada Perusahaan Niaga Negara diinstruksikan untuk menjalurkan barang² kebutuhan masyarakat seperti biasa dan memberikan prioritas kepada kebutuhan daerah khusus ibu kota Djakarta Raya.
5. Kepada Permigan/Permina diinstruksikan untuk tetap melaksanakan penjaluran minyak tanah/bensin/dan lain² dengan sistim jang telah ditentukan.
6. Kepada petugas² dari Angkatan Bersendjata diminta bantuan sepenuhnya guna kelantjaran penjaluran barang dari dan ke D.C.I. Djakarta Raya.

Djakarta, 7 Oktober 1965.

**MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI/KUASA
MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

t t d.

A. J U S U F
BRIG. DJENDERAL T. N. I.

MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI/ KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

S E R U A N

No. 034/MPDN/I/65.

Dengan ini kami mengetok hati dan djiwa kesadaran patriotik masjarakat dan menjerukan hal-hal sebagai berikut :

1. Tetap tenang melaksanakan Amanat² Paduka Jang Mulia Presiden Panglima Tertinggi ABRI /Pemimpin Besar Revolusi dalam usaha mengamankan dan menjelamatkan Revolusi Indonesia.
2. Memberikan bantuan sepenuhnya terhadap usaha memberantas anasir² kontra Revolusi disegala bidang.
3. Dalam rangka membantu Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dibidang penertiban dan pemulihan keadaan, chususnja dalam soal penghematan pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor, diminta bantuan dan pengertian masjarakat akan hal² berikut :
 - a. Prioritas bahan bakar diberikan kepada kendaraan² bermotor umum jang melajani kepentingan masjarakat, baik untuk pengangkutan penumpang maupun untuk pengangkutan barang.
 - b. Departemen² dan Lembaga² Pemerintah lainnja (ketjuali Angkatan Bersendjata R.I.) supaya mengadakan penghematan sedjauh mungkin dalam pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor.
 - c. Pemilik² kendaraan bermotor pribadi supaya mengurangi sebanjak mungkin kepergian jang tidak perlu.
4. Supaja masjarakat tetap tenang, perlu diketahui bahwa persediaan bahan bakar kendaraan bermotor tjukup banjak, hanja penjalurannja kepada umum masih sedang dalam taraf penertiban.
5. Tundjukkanlah djiwa dan kesadaran patriotik Saudara dengan melaksanakan seruan ini sebaik²nja, demi keselamatan Revolusi Indonesia jang dipimpin oleh P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

Djakarta, 8 Oktober 1965.

MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI/KUASA
MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

t t d.

A. J U S U F
BRIG. DJENDERAL T. N. I.

MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI/ KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

I N S T R U K S I

No. 035/MPDN/I/65.

Kepada : Semua Kepala² Perwakilan Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri di — Seluruh Indonesia.

Dengan ini diinstruksikan kepada Saudara² hal-hal sebagai berikut :

1. Export-drive harus tetap dilaksanakan sedemikian rupa hingga tidak terdjadi kemunduran dalam mementumnja.
2. Pemasukan dari barang² import dan barang² antar-pulau harus didjaga supaya tetap berdjalan lantjar dan tidak mengalami kematje'an dalam penjalurannja.
3. L/C2 jang telah dibuka harus tetap dilaksanakan.
4. Bersama pedjabat² resmi setempat supaya diusahakan agar pemasukan barang² import dan pengeluaran barang² export selalu terdjamin kelantjarannja.

Djakarta, 8 Oktober 1965.

**MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI/KUASA
MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

t t d.

A. JUSUF
BRIG. DJENDERAL T. N. I.

MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI/ KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

SERUAN KEPADA SEMUA PEDAGANG

No. 036/MPDN/I/65.

Diserukan kepada semua Pedagang Besar Importir, Eksportir, Pedagang Menengah Pedagang Ketjil dan chusunsja kepada para pedagang Warga Negara keturunan Asing hal-hal sebagai berikut :

1. Supaja masing² mendjaga kelantjaran djalannja roda perdagangan.
2. Djauhkan diri dari usaha spekulasi dan perdagangan jang mengakibatkan kenaikan harga jang tidak pada tempatnja.
3. Djangan menjalah gunakan keadaan demi kepentingan peribadi ataupun golongan, sehingga merusak kepentingan masjarakat.
4. Djauhkan diri dari keinginan menimbun barang dengan dasar tidak adanja kepertjajaan terhadap persediaan barang dihari depan. Agar penjaluran barang² kebutuhan masjarakat dan produksi tetap berdjalan sebagaimana mestinja.
5. Hanja dengan bantuan Saudara atas dasar kesadaran, keichlasan, dan kepatriotan dalam mengabdikan kepada Revolusi dibawah pimpinan P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno kesulitan² dalam bidang perdagangan banjak dapat teratasi.

Pertjajalah bahwa Rakjat Indonesia bersama Angkatan Bersendjata dibawah pimpinan P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi akan dapat mengatasi keadaan dan memulihkan kembali keamanan serta ketertiban untuk mentjapai masjarakat Sosial Indonesia jang adil makmur.

Tundjukkanlah bahwa bidang perdaganganpun tidak mau ketinggalan dalam pengabdian kepada Revolusi Indonesia.

Insja'allah kita bersama dapat mengatasi keadaan sekarang jang membahayakan djalannja Revolusi Indonesia.

Tuhan beserta kita.

Djakarta, 8 Oktober 1965.

MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI/KUASA
MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

t t d.

A. J U S U F
BRIG. DJENDERAL T. N. I.

KETENTUAN² MENGENAI PEMASARAN

HASIL² INDUSTRI, KERADJINAN TANGAN DAN BARANG² GOLONGAN III

JANG TIDAK TERMASUK DALAM DAFTAR PENGUMUMAN BLLD.

Untuk menstimulir/memperbesar ekspor dan produksi hasil² industri, baik jang berupa „finished-goods” maupun jang berupa „semi-finished-goods” dan hasil² keradjinan tangan rakjat, dan djuga mengenai barang² ekspor Golongan III jang tidak termasuk dalam daftar pengumuman harga oleh BLLD, maka dengan Instruksi Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri/Menteri Perdagangan Luar Negeri tanggal 20 September 1965 No. 036/9/MPLN/I/65 dan tanggal 9 Oktober 1965 No. 039/10/MPLN/I/65 telah ditetapkan ketentuan² mengenai pelaksanaan kebidjaksanaan pemasaran barang² ekspor tersebut.

Instruksi² tersebut ditunjukkan kepada Kepala Perwakilan Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Departemen Perdagangan Luar Negeri diseluruh Indonesia dan isinja adalah sebagai berikut :

Hasil² industri, baik berupa „finished-goods” maupun jang berupa „semi-finished-goods”.

1. Ekspor dilakukan oleh perusahaan² industri bersangkutan sendiri dan jang telah diakui sebagai produsen-eksportir;
2. Dalam menetapkan harga ekspornja, diterima setiap harga jang diajukan oleh si pengusaha sendiri;
3. Overprice jang diperoleh ditjatat B.L.L.D. dalam rekening Devisa Pelengkap B (D.P.B.) atas nama eksportir jang bersangkutan;
4. D.P.B. dipergunakan semata-mata untuk mengimpor sendiri bahan² baku dan „raw-materials” kebutuhan industri jang bersangkutan;
5. Untuk melaksanakan hal² tersebut pada ajat (1), (2), (3) dan (4), perlu si eksportir memberitahukan kepada Perwakilan Departemen Perdagangan setempat harga pendjualan jang sebenarnja jang dikehendaki pembeli (L/C penuh) dan dengan menetapkan harga penjerahan jang dikehendaki eksportir, dapat diketahui berapa djumlah D.P.B.-nja, untuk ditjatat oleh B.L.L.D.

Hasil² keradjinan tangan rakjat.

1. Untuk membantu memperkembangkan produksi dan pemasaran hasil² keradjinan rakjat jang belum dikenal atau sulit mendapat pasaran di luar negeri, penetapan harga penjerahannja ditetapkan seperti tertjantum pada ajat A (5) tersebut diatas.
2. Overpricenja jang diperoleh dapat ditjatat dalam rekening D.P.A. atau rekening D.P.B.

C. Barang² Golongan III jang tidak termasuk dalam daftar pengumuman harga B.L.L.D.

1. Eksportir harus memperlihatkan kawat konfirmasi persetudjuan harga dari pembeli;
2. Dari harga pendjualan ini, eksportir mengemukakan harga penjerahan jang diingininja, sehingga diketahui berapa ia mendapat overprice;
3. Overprice ini dibukukan sebagai D.P.A./D.P.B.;
4. L/C dibuka sedjumlah harga pendjualan jang diberitahukkannja sebagaimana dimaksud pada ajat (1).

D. Kebidjaksanaan impor dengan D.P.A. atau D.P.B.

1. Import-policy ditetapkan berdasarkan production approach, yakni jang dapat diimpor hanya bahan baku dan raw-materials, untuk industri jang memproduksi barang² jang telah diekspor untuk hasil² industri dan keradjinan tangan.
2. Dipergunakan untuk mengimpor kebutuhan² untuk keperluan memajukan produksi pertanian/industri upgrading.

E. Pelaksanaan Technis.

1. Untuk pengisian blanko formulir E I dan sebagainja, supaja memperhatikan Instruksi Direktorat ekspor No. 1547/ph/K/65 tanggal 26 April 1965 dan No. 1790/ph/K/65 tanggal 11 Mei 1965. *)
2. Hendaknja Perwakilan Departemen Perdagangan Daerah Tk I setempat diadakan kerdjasama jang sebaik²nja dengan B.L.L.D. setempat.
3. Angka Pengenal (A.P.) sementara buat tiap² tjalon eksportir hasil² industri/keradjinan tangan, dapat dikeluarkan sendiri oleh Perwakilan Departemen Perdagangan setempat; penyelesaian ketentuan² mengenai permintaan Angka Pengenal Ekspor (A.P.E.), selanjutnja dilakukan seperti biasa.

F. Laporan.

Untuk dapat mengikuti perkembangan ekspor khusus hasil² industri dan keradjinan tangan rakjat serta barang² Golongan III tersebut diatas, diminta agar kepada Perwakilan Departemen Perdagangan setempat untuk mengirimkan laporan khusus setjara periodik (10 hari) jang ditujukan kepada Direktorat Marketing dan Research. * * * *

Beberapa Aspek Perdagangan Luar Negeri

Oleh

J. PANGLAYKIM

Salah satu aspek penting dalam perdagangan internasional adalah ekspor. Ekspor sebagai sumber utama hasil devisa Indonesia merupakan salah satu faktor penentu dalam perentjanaaan program impor. Maka suatu program impor yang baik dengan pelaksanaan yang dilakukan menurut "timingnja" — akan menentukan sekali bagi roda perekonomian Indonesia, seperti kegiatan dalam bidang industri, agraria dsb. Bilamana devisa tidak mentjukupi atau program impor tidak dapat dilaksanakan menurut kebutuhan yang urgen dalam aparat produksi kita, maka ia akan mempengaruhi penghasilan pemerintah/kas Negara. Seperti telah kita lihat, terdapat defisit dalam anggaran belandja.

Defisit dewasa ini sudah besar sekali. Defisit yang besar antara lain telah menjebabkan mengganasnja Inflasi. Inflasi yang mengganasnja menunjukkan kepada kita pengaruh² yang djelek sekali, seperti timbulnja spekulasi, korupsi, salah-urus (mismanagement), birokrasi yang berlebih²-an dan berbagai hambatan² lain (bottlenecks). Alhasil dengan adanja inflasi harga² meningkat, antara lain harga bahan² untuk ekspor. Kenaikan harga daripada barang untuk diekspor mempunjai akibat djelek pada ekspor.

Setjara konkrit timbullah perbedaan antara harga dalam negeri dan hasil dari wesel bank. Ini dikenal sebagai diskrepansi atau disparita. Dengan disparita yang tinggi, para eksportir enggan mengekspor, bila tidak diberikan sebagai matjam perangsang. Ada perangsang yang setjara resmi diberikan. Kita kenal tjara² pemberian perangsang ini dari zaman Deviezen Certificate, B.E., B.P.E., dsb. dan terachir ini S.P.P. Pada permulaan pemberian perangsang² tersebut dapat diimbangi disparita yang harus dipikul oleh eksportir. Akan tetapi lambat laun insentives tsb. tidak lagi mentjukupi, sehingga timbul berbagai matjam tjara² untuk menjelewengkan dsb. Dus diskrepansi harga ini pada azasnja memukul ekspor dan menimbulkan gedjala² yang tidak baik seperti penjelundupan² dsb. Achirnja ekspor akan matjet dan ini akan mempengaruhi sekali djumlah devisa yang diterima oleh Negara.

Dari uraian diatas dapat kita tarik kesimpulan betapa vitalnja ekspor dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia. Maka dalam ekspor ini suatu eksperimen yang tidak diperhitungkan dan difikirkan dengan mendalam akan merugikan

hasil devisa, yang pula berarti merugikan d menghambat momentum dalam pembangunan ekonomi.

Kertas kerdja ini akan berusaha untuk meropong masalah ekspor Indonesia dari berbagai sudut pentingnja/vitalnja ekspor untuk meningkatkan momentum Revolusi Indonesia, yang p berarti memberikan djaminan akan mengalirkan barang²/djasa² setjara teratur/kontinu pada a rat produksi.

I. FAKTOR EKSTERN.

a. POLA EKSPOR INDONESIA.

Djika disektor impor pendjualan barang² j diimpor bukan merupakan persoalan, maka m keting hasil² ekspor di pasaran internasional m minta pengetahuan yang mendalam. Bilam pengetahuan dan keahlian tidak dimiliki, p pelaksana ekspor akan "dimakan" oleh para dagang di pasar internasional.

Dalam kita menindjau pola ekspor Indone kita tidak dapat melepaskan diri daripada ker taan, bahwa dewasa ini sebagian besar ekspor l masih disedot/terarah/diarahkan/dialurkan negara² Barat. Negara² Barat pada umum mempunjai industri yang "diversified", ane ragam tjoraknja. Karena industri negara² B sifatnja, "diversified" dan umumnja mementing industri konsumsi, maka kebutuhan² negara² akan bahan² mentah beranekawarna sekali. B matjam² bahan² perkebunan sampai hasil rak dibutuhkan oleh industri konsumsi Barat : ku binatang, kulit kerang, tapioka, kajumanis, e siavera, bidjipinang, bunga pala, minjak ete sagu, bidji tengkawang, kopra, damar, djelutu dsb. Pala misalnja merupakan bahan men utama untuk memproduksi mosterd, bidji te kawang mendjadi salah satu bahan untuk p buatan lipstik ; demikian djuga hampir meru kan salah satu bahan yang vital untuk pembu djintan. Belum kita perhitungkan kebutuh akan lada hitam, lada putih, buat mana kita d mensupply kurang lebih 60% daripada ke tuhan². Dengan demikian dapat dikatakan ba kebutuhan akan bahan² mentah kita di-neg Barat sangat "gevaneerd".

Lain halnja dengan industri² dinegara² sosi Umumnja tekanan ada pada industri berat, laupun sudah terdapat beberapa perubahan j

memberikan tanda² adanja perhatian kearah industri konsumsi. Pada permulaan sekali, negara² sosialis itu lebih suka pada bahan² mentah jang berasal dari perkebunan, seperti: karet, minjak, wit, teh dsb. Ini dapat terlihat dalam statistik mana ternjata pemilihan utama (vookeur) ada pada hasil² perkebunan. Akan tetapi dalam tahun² terakhir terdapat perubahan. Rusia, R.R.T. dan beberapa negara sosialis lainnja, mengkomunikir pembelian karet perkebunan dengan suatu persentasi jang berasal dari karet rakyat. R.R.T. mengimpor 21,987 ton karet dalam tahun 1960. Dari diumlah tersebut 665% berasal dari karet rakyat (sumber Biro Pusat Statistik).

Dengan perkataan lain, kita dapat membagi konsumen² kita dipasar internasional dalam: (1) negara jang mengkonsumir bahan² mentah kita, itu negara² industri, dan (2) jang membeli bahan² mentah kita, sebagai barang perdagangan. Dalam golongan pertama kita dapat memasukkan beberapa negara di Eropa seperti Djerman Barat, Perantiis, Inggris, Negeri Belanda dan Amerika Serikat. Dalam golongan kedua kita dapat bahwa Negeri Belanda mendjalankan dagangan transit, sehingga sebagian besar daripada barang² jang mereka impor adalah untuk didjual kembali pada pasar² lain. Demikian halnja dengan Hongkong, hanya barang² seperti rotan diverwerken dalam industrinja. Dahulu Singapura mendjalankan fungsi tsb., tetapi sekarang sudah merupakan suatu fakta, bahwa Singapura tidak lagi mendjalankan fungsi transit untuk barang² berasal dari Indonesia. Untuk sebagian barang² jang diimpor oleh Djepang djuga ada untuk pendjualan terus ke pasar² seperti Amerika dll.

Demikian halnja dengan beberapa negara Sosialis. Maka penting sekali untuk diperhatikan, agar kita tidak mendjual lebih daripada kapasitas industri mereka. Djika kita mendjual suatu djumlah lada jang melebihi kapasitas industrinja, maka barang² tersebut akan didjual kembali oleh mereka dalam pasar dunia. Pernah kedjadian bahwa kita mendjual suatu djumlah lada kepada salah satu negara sosialis, jang kemudian oleh mereka didjual terus pada pasar dunia internasional dengan harga jang djauh lebih rendah daripada harga penjerahan kita pada para eksportir Indonesia. Ini sudah tentu merugikan sekali pasar kita.

Dibawah ini kita akan memberikan beberapa angka persentasi jang menggambarkan ekspor kita ke negara² sosialis, barat dan sebagainja. Kita telah menjusunnja menurut kelompok² tertentu, blok² ekonomi jang ada didunia dewasa

Negara² anggota Comecon (Bulgaria, Hongaria, Polandia, Rumania, Tjekoslowakia, Djerman Timur).

Ekspor kenegara² anggota Comecon dari tahun 1957 — 1963 (Dj Januari — Maret) adalah dalam persentasi seperti berikut: 0.86%, 1.41%, 2.20%,

4.13%, 5.24%, 6.66% dan 3.95%. Umumnja menggambarkan suatu tendensi meningkat, khusus dalam rangka kita mempergiat kerdjasama ekonomi dengan negara² Nefos.

2. *Negara² observers Comecon (RRT, Korea Utara, Vietnam Utara).*

Pembelian oleh negara² sosialis jang tidak tergabung dalam Comecon, dari tahun 1957 — 1963 (Dj Januari — Maret) adalah sbb.: 2.60%, 5.75%, 6.68%, 4.22%, 5.05%, 5.51%. Dari persentasi tersebut RRT-lah jang terbanjak mengimpor.

Selanjutnja ada dua negara sosialis jang tidak mendjadi anggota Comecon, jaitu Jugoslavia dan Kuba.

Bila kita djumlahkan persentasi ekspor ke negara² sosialis dari masa tersebut maka kita dapat angka² seperti berikut: 3.50%, 7.19%, 8.36%, 8.4%, 10.11%, 12.34% dan 9.90%. Tendensi menggambarkan kenaikan persentasi. Menurut keterangan, tendensi ini akan meningkat terus, dengan adanja berbagai persetujuan bilateral dengan negara² sosialis, serta tekad kita untuk memperbesar kerdjasama dibidang ekonomi dengan negara² Nefos.

3. *Negara² Pasar Bersama Eropa (European Common Market: Belgia, Perantiis, Negeri Belanda, Djerman Barat, Itali, Luxemburg).*

Perdagangan kita dengan negara² Pasar Bersama Eropa dari tahun jang sama memberikan persentasi seperti berikut: 23.97%, 12.07%, 10.48%, 10.28%, 8.47%, 12.50%. Persentasi tahun 1957 ke tahun 1958 menggambarkan suatu penurunan jang keras sekali. Ini disebabkan oleh karena pada waktu itu kita sedang mengadakan Konfrontasi dengan Belanda.

Karena dewasa ini kita sudah memulihkan kembali hubungan dagang dengan Negeri Belanda, maka dapat diharapkan bahwa persentasi dari 20 — 25% akan dapat diapai lagi dengan blok Pasar Bersama Eropa karena Negeri Belanda adalah anggota daripada blok tersebut.

4. *Negara² EFTA (European Free Trade Zone: Inggris, Portugal, Swiss, Austria, Denmark, Norwegia, Swedia).*

Dengan negara² EFTA persentasinja adalah: 8.13%, 13.01%, 22.57%, 17.18%, 6.91%, 16.36%, 23.06% Nampaknja terdapat suatu masa dimana ekspor jg. biasanja disalurkan melalui Negeri Belanda telah diambil oleh Inggris. Dengan adanja konfrontasi kita dengan projek neokolonialisme "Malaysia", maka ekspor ke Inggris akan berkurang lagi.

Bilamana sekarang kita djumlahkan persentasi daripada ekspor ke negara² Eropa (P.B.E., E.F.T.A. dll) maka djumlah seluruhnja adalah sebagai berikut: 32.20%, 25.10%, 33.06%, 27.90%, 17.37%, 24.93%, 35.63%. Dapat dikatakan bahwa persentasi ke negara² Eropa dalam keadaan jang biasa mendekati 30%. Djika sekarang memperhitungkan pulihnja hubungan baik dengan Negeri

Belanda, maka persentasi 30% dengan mudah akan didekati 40%. Sebelum tahun 1957 ekspor ke Negeri Belanda dengan mudah mendekati 15% dari seluruh ekspor Indonesia. Akan tetapi dalam hubungan ini kita harus berhati², karena P.B.E. sudah tentu akan mengadakan berbagai matjam sistim quota, tarif², duties dsb. yang memberatkan negara² yang bukan mendjadi anggota (associate members). Banjak negara² Afrika misalnja memproduksi bahan mentah, seperti : karet, kopi, bidji tjoklat, tembakau, dsb., tak ubahnja dengan Indonesia.

5. Amerika Serikat.

Ekspor ke U.S.A. antara 1957 — 1961 adalah seperti berikut : 15.38%, 17.20%, 16.44%, 23.08%, 23.33%. Persentasi ini mendekati 20% dari ekspor kita. Khusus beberapa barang seperti brown crepe hanja mempunyai pasar di Amerika, demikian djuga dengan lada hitam. Dapat diharapkan, bahwa ekspor ke U.S.A. akan menurun, dalam arti pengiriman/pembukaan L/C tidak akan dilakukan langsung tetapi mungkin melewati Negeri Belanda, Djepang dsb. Dengan demikian kebutuhan akan bahan² mentah tidak akan menurun, hanja pembeliannja tidak lagi dilakukan langsung akan tetapi via negeri lain.

6. Negara Asia.

Ekspor ke negara² Asia Tenggara (termasuk Singapura) dalam tahun 1957 — 1961 rata² adalah diatas 30%, jaitu 33.37%, 37.39%, 31.87%, 35.59% dan 33.15%. Ditambah lagi dengan Asia Timur yang persentasinja seperti berikut : 9.38%, 10.30%, 11.26%, 9.40%, 13.02%. Dalam Asia Timur termasuk Hongkong dan Djepang.

Dari angka² diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa paling sedikit 20 — 25% dari djumlah yang pernah diekspor ke Singapura kita alihkan ke negara² lain, kita mendjualnja setjara langsung kepada konsumen. Maka dapat dilihat bahwa angka² ekspor ke negara² konsumen meningkat. Ini berarti bahwa persentasi sebesar 20 — 25% akan dibagi antara negara sosialis, negara² Asia dan Negara² di Eropa.

Setelah mempelajari angka² diatas, kita dapat menarik kesimpulan, bahwa ekspor terbesar adalah ke negara² Barat (Eropa lebih kurang 35%, Amerika Serikat 20%); ekspor kita ke negara² sosialis besarnja antara 15 — 20%, dan sisanja disalurkan ke negara² di Asia (antara 20 — 25%).

Sebagian daripada barang² yang dikirimkan kebeberapa negara Eropah (chususnya Negeri Belanda) dan beberapa negara Asia (Hongkong — Djepang — Muangthai) rupanja telah direkspor ke negara² konsumen. Sehingga para broker di negara² tersebut memperoleh keuntungan daripada business tersebut yang tidak akan terdjadi, bila kita dapat mendjual langsung ke negara konsumen itu. Untuk dapat melaksanakan pendjualan langsung ini kita harus dapat memberikan fasilita² yang sama dengan para brokers tsb.

Pola ekspor diatas memberikan kepada kita kesempatan untuk meninjau masalahnja dengan lebih mendalam. Negara² Barat yang menerima barang kita sebagai bahan² industrinja, hanja kita intensivir, sedangkan yang mendjalankannya sebagai perdagangan transito, harus kita tindjau kembali. Sebagian dari business transito ini mungkin dapat kita salurkan lewat niaga² kita sehingga sebagian daripada profit itu dapat kita kantong. Akan tetapi sebelum niaga² kita dapat mengambil alih business tersebut mereka hanja terlebih dahulu memenuhi sjarat² yang lazim berlaku dalam perdagangan internasional.

Perdagangan kita dengan negara² sosialis hanja diperhebat melalui berbagai matjam trade agreement yang dasarnya harus ekonomis. Dalam trade agreement yang kita harus menekankan kepada pendjualan barang² pertanian rakjat, sehingga dengan demikian kita mentjiptakan pasar² baru.

b. PEMBERIAN FASILITA².

Seperti diuraikan diatas, salah satu aspek yang telah memungkinkan perdagangan transito berlangsung terus, adalah pemberian fasilita² kepada para brokers diluar negeri. Aspek yang lain yang penting dalam perdagangan internasional adalah tersedianja fasilita² dalam memasarkan (marketing) bahan² mentah. Apabila didalam negeri masalah pendjualan barang² impor bukan merupakan masalah yang sulit, karena mendapat seller's market, maka dalam bidang memasarkan bahan² mentah, aspek pendjualan/pemasaran (marketing) adalah aspek yang kompleks.

Dalam memasarkan bahan² mentah kita (seperti : karet, kopra, lada dsb.) kita dihadapi oleh negara² lain yang djuga berusaha merebut sebagian dari pasar kita. Dalam usaha itu mereka menggunakan berbagai teknik perdagangan untuk menarik lebih banjak pembeli, yang berarti memperbesar ekspornja.

Salah satu aspek yang penting dalam perdagangan internasional adalah ketentuan para konsumen bahwa : barang² itu harus tersedia bila mana mereka membutuhkannya, dalam djumlah yang diperlukan, pada waktu yang dikehendaki dan menurut perdjandjian² (agreement) yang telah disetujui. Sjrat² ini berarti menentukan bonafidita para eksportir.

Sjrat diatas merupakan suatu keharusan dalam perdagangan internasional. Maka sebagian daripada produsen bahan² mentah mengusahakan dan melaksanakan keharusan tersebut, Bahwa mereka bertindak lebih djauh, dan memberikan service/fasilita² yang sebaik²nja kepada negara konsumen tersebut.

Mereka bersedia memberikan konsesi untuk mengirim barang² terlebih dahulu tanpa pembayaran L/C. Barang² itu baru dibayar setelah dipelabuhan konsumen; ini dikenal sebagai "open documents". Untuk si konsumen ini berarti suatu penundaan bajaran dari katakana sediaan bulan. Satu bulan kredit dari produsen ber

tidak perlu membayar bunga bank. Disamping fasilitas dalam pembayaran, para produsen juga memberikan pelayanan yang cepat bila terdapat suatu claim yang diakui. Dengan segera mereka dapat memerintahkan untuk mengkompensasi konsumen. Perhitungan dapat dilakukan kemudian. Juga pengeksporan yang diatur setjara kontinuu dan "regular" merupakan suatu syarat penting dalam rangka fasilitas. Bukan sadsa kontinuu akan tetapi pun kwalitanja tidak boleh terlalu "fluctuerend". Karena ini akan memberikan pengaruh besar kepada bonafidita eksportir.

Fasilitas diatas dapat kita lihat diberikan oleh eksportir Hongkong, eksportir di Negeri Belanda, dan dengan para brokers di Djepang. Untuk dapat memberikan fasilitas tersebut mereka harus dapat "terugvallen" pada suatu banking system, dasar keuangan yang memberikan kemungkinan "verdiskontir" wisel dalam pasar uang.

Pemberian fasilitas dalam bidang pembiajaan dan claim merupakan suatu kebiasaan didunia perdagangan internasional. Maka penting sekali untuk kita memperhatikan aspek ini. Memperbesar ekspor bukan sadsa berarti memperbesar produksi didalam negeri, akan tetapi juga mengikuti dan memperhatikan tehnik² perdagangan yang sudah lazim dilaksanakan oleh negara² konkuren kita dalam bahan² mentah. Apabila kita memaksakan" peraturan kita sendiri (own rules of the games) yang dapat dianggap bertentangan dengan kelaziman dalam perdagangan internasional, maka akibatnja adalah penurunan akan bagian kita didalam pasar dunia. Ini tidak berarti bahwa kita tidak dapat memberikan syarat² kita "own rules of the games". Mungkin untuk beberapa produk dimana kita mempunyai kedudukan monopoli seperti pala, gambir, dan mungkin lada, tembakau, setelah kita memperhatikan menganalisa aspek²nja dengan mendalam. Kita lambat laun dapat menentukan syarat² kita sendiri dalam pendjualan barang² itu. Akan tetapi kita harus waspada, agar djangan ini memberikan dorongan para industriawan di negara tersebut untuk mentjari barang² sintetis, sebagai substitut, yang mengakibatkan mereka tidak tergantung lagi pada produk² negara agraria.

Maka hubungan ini penting sekali bahwa kita sebagai negara yang banyak mengekspor bahan² agraris, mengetahui dengan mendalam fasilitas² apakah yang tersedia di negara² konkuren kita, seperti outillage pelabuhan yang serba lengkap, komunikasi yang baik, pengangkutan yang rapih, dasar uang yang berkembang, dsb.

TRADE GAP DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI.

Kesimpulan yang ditjapai dalam salah satu konfrontasi antara negara yang telah maju dan negara² yang sedang berkembang di Djeneva dalam tahun 1964, menyatakan bahwa pada tahun 1970 tiap² negara yang sedang berkembang harus ditjapai suatu persentasi pertumbuhan ekonomi yang minimum tingginja 5 persen.

Akan tetapi pertumbuhan 5 persen ini tidak dapat diselenggarakan bilamana tidak tertjapai persesuaian paham mengenai kebidjaksanaan dalam kerdjasama perdagangan internasional yang akan memungkinkan untuk menghilangkan ketidak-seimbangan dalam perdagangan. Untuk memperoleh 5 persen "minimum growth" ini, para negara yang sedang berkembang harus mengimpor barang² kebutuhan industri dalam negeri. Tiap tahun ini harus meningkat dengan minimum 6 persen dan ini harus dibiajai oleh kenaikan dari volume ekspor sebesar 6 persen.

Karena negara² oldefos berpendapat bahwa kedua faktor (kenaikan impor dan ekspor sebesar 6 persen) tidak akan dipenuhi oleh negara² yang sedang berkembang, maka mereka tiba pada kesimpulan bahwa "trade gap" antara negara² industri dan negara yang sedang berkembang akan mendekati US\$ 20 miljard pada tahun 1970.

Mungkin trade gap ini akan lebih besar, bila kita memperhitungkan fakta bahwa permintaan akan impor barang² industri. Permintaan akan impor barang² industri. Permintaan akan bahan² mentah yang menurun itu, antara lain dipengaruhi oleh perkembangan tehnologi di negara² industri. Perkembangan tehnologi menggambarkan tendensi kearah lebih banjak mempergunakan bahan² sintetis. Ini berarti bahwa bahan² mentah (natural produced raw materials) makin sedikit dibutuhkan dibandingkan dengan jumlah bahan² sintetis. Misalnja jumlah karet alam yang akan dipergunakan untuk memproduksi ban makin lama makin berkurang. Hal² sematjam ini akan terdapat juga dalam produksi bahan² kosmetika (bidji tengkawang, eterische olien dsb).¹

Dapat ditambahkan disini, bahwa perkembangan tehnologi antara lain telah membangkitkan, bahwa banjak daripada produksi itu dimekanisir serta upah pekerdja meningkat. Hal ini dapat kita ilustrasi dengan beberapa tjontoh. Di Djerman Barat, karena upah buruh meningkat dalam industri tjerutu, maka penggulangan tjerutu tidak dikerdjakan dengan tangan tapi dilaksanakan setjara maksimal. Karena daun tembakau bentuknja tidak uniform maka sulit untuk digulung dengan mesin, sehingga harus ditjari suatu matjam bungkusan tjerutu yang lebih sesuai. Maka diproduksi sematjam kertas yang bahan²nja diambil dari tembakau dan bahan² sintetis. Dengan pemakaian kertas tersebut itu, maka kebutuhan akan "deklblad" kita menurun. Tjontoh yang lain adalah dari Djepang. Djepang pada dewasa ini mengalami kesulitan tenaga kerdja. Kekurangan akan karyawan ini mengakibatkan industri relatif lebih mahal daripada tekstil dari Hongkong. Karena mempelejadiari handikap ini, maka sebagian dari industriawan Djepang mengalihkan perhatiannja ke sektor elektronis. Dengan demikian industri elektronis di Djepang maju dengan pesat. Ini berarti bahwa kebutuhan akan bahan² mentah menurun di Djepang, walaupun mungkin untuk

sebagian dapat ditampung di Hongkong. Akan tetapi industri tekstil di Djepang sudah menspesialisir diri dalam tekstil yang mempergunakan bahan² mentah sintetis (jang mereka produser sendiri), seperti berbagai matjam rayon, dacron, dsb.

Penggunaan akan bahan² sintetis meningkat. Kebutuhan akan serat² alam selama tahun 1958-1960 telah menurun sampai 12%, sebagai akibat daripada penggunaan bahan² sintetis. Demikian juga halnya dengan pemakaian karet sintetis.

Persoalannya berlainan sekali pada pemakaian metals dan ores, bidjih besi. Kebutuhan akan bahan asal dari pertambangan, telah meningkat sampai 160% dari tahun² 1927-1929 sampai dengan tahun 1958-1961 di negara Eropa Barat. Kebutuhan akan minjak meningkat dengan hampir 22 kali. Djadi produk hasil tehnologi apapun, akan tetapi khusus untuk minjak kita harus perhatikan adanya perkembangan research untuk mempergunakan tenaga atom sebagai alat penggerak. Menurut beberapa ahli, kemungkinan bahwa penggunaan minjak tanah alamijah akan turun, adalah bahaya jang riil.

Perlu diterangkan bahwa komposisi, ekspor kita tidak tergantung semata² pada barang² jang berasal dari agraria; kita djuga memproduksi bahan² mentah jang berasal dari pertambangan. Ini akan kita bahas kemudian.

Faktor ekstern menggambarkan kepada kita pola ekspor jang dalam kenyataan masih terarah ke negara industri Barat, walaupun ada usaha keras dan positif untuk mengalihkan sebagian daripada pasar Barat ke negara² Nefos. Pemberian fasilita dalam bidang ekspor oleh para konkuren kita di pasar internasional merupakan faktor jang harus kita hitungkan dalam memperbesar nasar dunia internasional. Djuga perlu diperhatikan perkembangan tehnologi jang akan mengakibatkan kebutuhan akan bahan² mentah jang berasal dari pertanian akan menurun. Disamping itu ada aspek politik jang harus mendapat perhatian kita pula, jaitu usaha lawan untuk "mengepung" kita dan menjemooahkan nama baik kita di pasar internasional.

II. FAKTOR² INTERN.

Setelah kita membahas beberapa faktor ekstern, sekarang kita akan meneropong beberapa faktor intern jang menguasai ekspor kita. Tekanan akan diberikan kepada masalah jang ada hubungannya dengan marketing. Aspek² produksi tidak akan kita bahas dalam kertas kerdja ini, karena kami ingin serahkan masalah ini kepada mereka jang lebih kompeten.

Sebelum kita tiba pada analisa jang lebih umum sifatnya kita akan memberikan beberapa data sebagai "background material" jang kita akan butuhkan untuk analisa kemudian.

a. KOMPOSISI BARANG² EKSPOR.

Terlampir kita memberikan dua tabel ekspor, pertama jang menggambarkan besarnya ekspor

dalam US\$, dispesifikasi menurut barang² ekspor penting; tabel kedua memberikan nilainya dalam % (persentasinja).

Tabel² tersebut menerangkan bahwa karet adalah salah satu produk utama dalam ekspor. Jang penting untuk diketahui adalah, bahwa sebagian terbesar datang dari ekspor karet hasil pertanian rakjat. Demikian djuga kita dapat melihat dengan kopra. Kopra dapat dikatakan adalah hasil rakjat semata² karena tidak ada produksi kopra oleh perkebunan² besar.

Tabel jang menggambarkan target ekspor, jang dibuat oleh MUPPENAS merentjanakan djumlah jang seluruhnya daripada hasil perkebunan dan hasil pertanian rakjat serta pertambangan. Djumlah dari hasil pertanian rakjat merupakan lebih dari 50% dari seluruh ekspor Indonesia (tanpa minjak).

Mari kita tindjau konsekwensi daripada komposisi tersebut. Menurut angka jang kenyataan, maka lebih dari 50% ekspor Indonesia adalah hasil pertanian rakjat; maka sewadarnjalah perhatian pula diberikan pada sektor ini.

Bilamana kita menindjau masalah perkebunan dan pertanian rakjat maka kita tidak dapat melepaskan diri daripada kenyataan bahwa hasil perkebunan diselenggarakan oleh kesatuan² jang sudah terorganisir tahun demi tahun. Perkebunan sudah mempunyai susunan organisasi dan management jang lumajan serta ada badan² pemerintah jang mengkoordinir usahanya serta mengawasinja. Pun djumlah daripada kesatuan² tersebut tidak lebih dari beberapa ribu, serta "size-nya" bukan tergolong size jang liliput. Lain halnya hasil pertanian rakjat. Produsen pertanian rakjat tergolong dalam sektor jang belum terorganisir; djumlahnya besar sekali sehingga ia dapat dinamakan usaha² liliput.

Usaha² liliput ini tersebar diseluruh pelosok tanahair kita. Karena ketjil²nya serta tersebarnja diseluruh tanahair, maka sulit untuk mengorganisir mereka. Sebagian ini disebabkan oleh karena mereka belum merupakan kesatuan produksi jang diatur oleh suatu organisasi akan tetapi lebih bersifat pekerdjaan pribadi. Karena petani² rakjat belum terorganisir maka para pedagang perantara dapat menguasai dan mengekang mereka melalui berbagai tjara persetudjuan, pemberian kredit dsb.

Umumnya para tengkulak itu termasuk golongan jang merupakan bagian dari salah satu organisasi perdagangan. Mereka mempunyai "linkase dengan "unorganized money market", dengan supplier bahan mentah atau konsumsi jang diperlukan oleh para petani dsb. Para tengkulak itu memiliki fasilita² pengangkutan, mempunyai keahlian dalam sortasi, serta mempunyai pengetahuan mengenai perkembangan pasar dunia dan pasar ekspor, jang tidak dimiliki oleh petani ketjil itu.

E K S P O R : NILAINJA (Rp. Djuta)

	K a r e t			Minjak			Minjak			Lada			Rp. Djuta	\$ Djuta	
	Rakyat	Perke- bunan	Dijumlah	Tanah + hasilnja	Timah	Kopra	Kopi	Teh	Tembakau	Sawit	Gula	Rempah ²			Lain ²
1938 ¹⁾	71	87	158	163	34	43	14	37	39	19	45	18	97	687	351
1951 ²⁾	1.670	820	2.490	700	310	500	80	140	90	140	4	60	400	4.910	1.290
1952 ³⁾	2.520	2.260	4.780	2.180	980	640	210	270	270	350	2	240	740	10.650	934
1953	1.520	1.560	3.080	2.290	930	730	340	270	280	380	110	210	730	9.340	819
1954	1.860	1.160	3.020	2.390	700	660	460	450	370	350	260	190	840	9.880	886
1955	2.960	1.930	4.890	2.400	630	480	180	180	300	310	210	160	740	10.780	945
1956	2.310	1.710	4.020	2.560	730	510	340	340	330	350	190	150	520	10.050	882
1957	2.320	1.660	3.980	3.680	620	490	330	340	380	350	150	180	510	11.050	969
1958	1.740	1.240	2.980	3.220	430	240	210	280	350	310	80	110	400	8.610	755
1959	3.130	1.630	4.760	2.640	410	360	220	230	280	270	30	250	500	9.940	872
1960 ⁴⁾	9.800	6.010	15.810	9.940	2.230	1.220	600	1.200	1.100	1.145	145	456	1.850	35.785	795
1961	7.430	5.140	12.570	11.709	1.290	1.290	650	1.126	1.180	1.040	0	590	1.425	33.390	742
1962	7.955	4.310	12.265	9.720	975	795	615	880	1.500	805	115	285	1.220	29.850	663
1963	5.955	4.105	10.060	12.100	660	660	750	745	1.155	1.025	855	600	1.180	30.350	674
1964	5.210	3.610	8.820	7.590	925	925	1.175	560	580	725	895	523	930	24.155	537

TJATATAN : 1) Kurs \$ = Rp. 1,8 (Gulden)

2) " \$ = Rp. 3,8

3) " \$ = Rp. 11,40 (Thn 1952 s/d 1959)

4) " \$ = Rp. 45,— (Thn 1960 s/d 1964)

E K S P O R (PERSENTASE DARI JUMLAH NILAI EKSPOR)

Tahun	Minjakk						Minjakk					
	Karet	Tanah & Hasilnja	Timah	Kopra	Kopi	Teh	Tembakau	Sawit & Hasilnja	Gula	Lada & Rempah ²	Lain ²	Djumlah
1938	25,—	23,8	5,—	6,3	2,—	8,3	3,7	2,8	6,5	2,6	14,—	100%
1951	50,7	14,3	6,1	10,3	1,6	2,9	1,8	2,9	0,—	1,2	8,2	100%
1952	44,9	20,5	9,2	6,—	1,9	2,5	2,5	3,3	0,—	2,2	6,9	100%
1953	33,—	24,5	9,9	7,8	3,7	2,9	2,9	4,1	1,2	2,2	7,8	100%
1954	30,5	26,1	7,2	6,7	4,6	4,6	3,8	3,6	2,6	1,9	8,4	100%
1955	45,4	22,8	5,3	4,5	1,6	3,3	3,—	2,9	2,—	1,5	6,7	100%
1956	40,2	25,5	7,2	5,—	3,4	3,4	3,3	3,5	1,9	1,5	5,1	100%
1957	36,—	33,3	5,6	4,4	3,—	3,1	3,5	3,1	1,8	1,6	4,6	100%
1958	34,6	37,4	5,—	2,5	2,4	3,3	4,—	3,5	1,2	1,3	4,5	100%
1959	47,8	26,5	4,1	3,5	2,2	2,3	2,8	2,7	0,6	2,5	5,—	100%
1960	44,2	27,8	6,2	3,4	1,7	3,6	3,—	3,2	0,4	1,3	5,2	100%
1961	37,7	35,—	5,5	3,9	1,9	3,4	3,5	3,1	0,—	1,8	4,2	100%
1962	41,—	32,6	5,5	2,6	2,—	3,—	5,—	3,—	0,4	0,9	4,—	100%
1963	33,1	40,—	4,—	2,2	2,5	2,4	3,8	3,4	2,8	2,—	3,8	100%
1964	36,6	31,1	6,1	3,9	4,9	2,3	2,4	3,—	3,5	2,2	4,—	100%

*Target Ekspor 1965 — 1968 oleh Komisi III,
Musjawarah Pembantu Perentjanaan Pembangunan
Nasional R.I. 28 Djuni 1965 — 5 Djuli 1965*

<i>Hasil Perkebunan.</i>	US\$ djuta			
	1965 ¹	1966	1967	1968
1. Karet Perkebunan	98,33	103,50	110,25	117,00
2. T e h	16,88	17,48	17,17	17,94
3. Minyak kelapa sawit	24,80	24,90	25,00	25,00
4. Bidji kelapa sawit	3,66	3,72	3,73	3,90
5. Kopi bidji Perkebunan	4,20	4,55	4,90	5,25
6. Tembakau lembaran (ketjuali krosok)	14,85	15,30	15,75	16,30
7. Gula pasir	15,00	15,00	15,75	16,50
8. Serat-serat	0,68	0,88	1,31	1,75
9. Lain ² hasil Perkebunan	1,60	2,40	3,20	4,00
	180,00	187,73	197,65	207,54
<i>Hasil Pertanian Rakjat.</i>				
1. Karet Rakjat	124,00	140,00	155,00	170,00
2. K o p r a	51,00	52,70	56,00	57,75
3. Tembakau Krosok & Irisan	6,72	7,06	7,41	7,45
4. Kopi bidji rakjat	14,75	16,58	18,20	19,50
5. L a d a	16,75	17,42	18,36	19,04
6. Bungkil kopra	3,30	3,63	3,96	4,13
7. Lain ² hasil hutan perk. rakjat	20,00	23,28	27,00	29,40
	236,52	260,67	285,93	317,27
<i>Hasil Hutan.</i>				
1. R o t a n	1,85	2,00	2,18	3,33
2. Kopal dan damar	1,60	1,75	1,90	2,05
3. Lain ² hasil hutan	5,66	10,15	13,28	16,60
	9,11	13,89	17,36	21,98
<i>Hasil³ pertambangan.</i>				
1. Timah putih	60,00	65,10	70,40	73,00
2. Lain ² hasil Pert.	5,00	6,12	7,28	8,10
	65,00	71,22	77,68	86,10
3. Lain ² hasil ekspor	9,37	16,49	26,38	28,10
4. Djumlah	500,00	550,00	605,00	661,00

Kenjataan yang lain adalah bahwa sebagai akibat daripada belum terorganisirnya sektor pertanian rakyat maka mereka mudah sekali dikuasai oleh para pedagang perantara yang merupakan "voorposten" dari para eksportir swasta. Dengan perkataan lain sektor yang belum terorganisir adalah setjara kenjataan dikuasai oleh sektor swasta. Penguasaan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan adanya "unorganized money market" yang untuk sebagian besar juga dikuasai oleh golongan swasta. Aspek ini kita sudah bahas dengan panjang lebar dalam karya kami dengan judul "Beberapa Tjataan Mengenai Organisasi Pembelandjaan (financiering)".

Dalam karangan itu diterangkan dengan jelas, betapa organisasi lembaga kita dewasa ini memberi kesan yang kuat, bahwa dalam pelaksanaannya, ia memperkuat kedudukan daripada "unorganized money market". Memang tidak enak untuk mengatakannya, akan tetapi tiap² peladjaran dalam marketing yang djudjur pada diri sendiri harus mengakui bahwa kenjataan adalah demikian. Tanpa perubahan setjara fundamental daripada organisasi pembelandjaan dewasa ini kita tidak akan dapat melemahkan apalagi melemahkan kedudukan sektor yang unorganized itu. Melemahkan "bargaining position" daripada "unorganized money market" berarti memberikan lebih banyak kemungkinan kepada sektor yang belum terorganisir untuk melepaskan diri dari penguasaan sektor yang sudah terorganisir yang menguasainya.

Selanjutnya tabel terlampir itu menggambarkan menurunnya ekspor setjara nyata, yakni ekspor seharga US\$ 1.220 (termasuk minjak) dalam tahun 1961, menurun sampai US\$ 550 (termasuk minjak) dalam tahun 1964.

Kemudian ini substansiil sekali.

Bilamana kita melihat aspek tabel mengenai persentasi² maka tampak bagian karet daripada ekspor Indonesia sudah mulai menurun, dan persentasi minjak mulai meningkat. Yang terang disini adalah bahwa ekspor hasil² produk lemah (weak export products) belum dapat mentjapai kembali persentasinya sebelum perang, jaitu 14% daripada seluruh ekspor. Dus ekspor barang² lemah perlu sekali mendapat perhatian kita. Persentasi kopra. Persentasi kopra dari seluruh ekspor.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa 60% dari ekspor kita adalah dari hasil pertanian atau agraria dan 40% dari hasil pertambangan. *Suatu komposisi yang berlainan sekali bila dibandingkan dengan komposisi ekspor negara² pertanian lainnya.*

Kita tahu ekspor bukannya suatu bidang yang berdiri sendiri, tapi ia mempunyai sangkut pautnya dengan seluruh roda ekonomi kita. Tanpa ada suatu kebidjaksanaan ekonomi yang menjeluruh tidaklah mungkin kita mengadakan export drive yang berhasil. Suatu peningkatan dalam sektor ekspor adalah soal yang maha vital, seperti

sudah kita ketahui dari uraian² terlebih dahulu. Dan peningkatan dalam sektor ekspor harus dapat dilaksanakan dengan sukses bilamana kita dapat suatu kebidjaksanaan ekonomi yang menjeluruh serta pelaksanaannya dilakukan dengan konsekwen dan berdisiplin.

b. KEBIDJAKSANAAN EKONOMI.

Kebidjaksanaan dalam bidang ekonomi berarti suatu kebidjaksanaan ekonomi yang menjeluruh. Menjeluruh dalam arti bahwa diberbagai bidang strategis harus ada satu kebidjaksanaan, tidak boleh betentangan, tidak boleh simpangsiur. Apakah bidang² strategi itu?

Bidang strategis menurut pandangan kami adalah (1) keuangan, (2) produksi, (3) komunikasi (termasuk djalan² didarat/laut, pelabuhan, industri, struktur, mass media), (4) perdagangan (luar dan dalam negeri), (5) politik ekonomi luar negeri.

Kebidjaksanaan yang diambil dalam berbagai bidang ini tidak boleh saling menentang atau saling menghalangi. Karena tidak mungkin ekspor berdjalan apabila bidang² lain tidak diselenggarakan kebidjaksanaan yang sama. Ekspor tidak akan dapat berdjalan apabila pelabuhan² dan komunikasi tidak berfungsi untuk melantarkan pelaksanaan ekspor, atau merupakan faktor² penghambat dengan berbagai matjam prosedur, yang menjulitkan sehingga kapal² tidak dapat diberangkatkan service yang seharusnya.

Kapal² dalam praktek lebih banyak menganggur di dermaga daripada berlajar. Demikian pula dengan bidang keuangan dan bank: apabila sektor keuangan dan bank tidak memberikan layanan/fasilita yang baik, ekspornpun akan matjet.

Kesimpulannya :

Suatu kebidjaksanaan ekonomi yang menjeluruh dan integral serta dilaksanakan dengan konsekwen dan dengan disiplin revolusioner adalah syarat mutlak untuk mentjiptakan iklim yang memungkinkan perkembangan dalam bidang perekonomian pada umumnya dan perdagangan luar negeri (ekspor) pada khususnya.

Dibawah ini kami memberikan tjontoh dalam alam praktek, yang menggambarkan adanya banyak decision centres yang tidak memungkinkan kebidjaksanaan ekonomi dilakukan setjara disiplin dan konsekwen.

c. TERLALU BANJAK DECISION CENTRES

Salah satu kesulitan pokok yang dianggap oleh para eksportir adalah tidak adanya satu badan hukum yang dapat merumuskan kebidjaksanaan dalam bidang ekspor tanpa intervensi dari instansi² yang harus diserahkan pelaksanaannya. Instansi² itu mempunyai hak dan wewenang yang kritisnya seringkali merupakan faktor penghambat bagi penjaluran barang² ekspor.

Mari kita mengikuti eksportir dalam rangka melaksanakan ekspor. Pertama dalam pengumpulan barang² ekspor di tingkat² daerah desa

rus dapat memberikan tjukup uang djasa pada unsur² untuk melantjarkan pengiriman rang² itu dari daerah. Dari desa sampai ke kota ngumpulan itu mengalami berbagai matjam adjak", baik jang terlihat maupun jang tidak terlihat.

Ini baru merupakan sebagian daripada prosedur ng harus dilewati oleh para eksportir. Belum g kita sebut decision centres jang berada di usat. Kita mulai dengan Djawatan jang harus ententukan penjerahan, bank² jang harus meng- us berbagai dokumen, B.L.L.D. jang menentu- n dan behandelan D.P.A. dsb., B.N.I. jang akan enerima S.P.P.nja, Douane jang harus menje- djui atau memberikan fiat ekspornja, unsur² au pusat pengambilan keputusan di pelabuhan² asalah kapal² dan sebagainya. Semua decision ntres ini harus dilewati oleh tiap² eksportir ng hendak mengirim suatu party barang ke luar geri.

Seringkali kita bertanja, apa sebabnja para sportir masih bersedia untuk bekerdja dengan anja demikian banjak hambatan dan birokrasi² akah mereka masih memperoleh keuntungan alaupun harus menjediakan demikian banjak adjak" jang kelihatan dan tidak kelihatan. ampaknja demikian. Ada eksportir jang bona- le jang djuga tidak berniat bekerdja bilamana umlah jang harus dipertanggung-djawabkan dah melampaui batas. Tapi ada pula ekspor- ² jang djustru melihat kesempatan baik untuk ut main dan tjukup berani untuk menjerempat haja. Ada djuga jang menjerahkan pelaksanaan ² jang demikian pada para brokers, orang per- tara jang mengetahui seluk beluknja. Peran- ra² ini dikenal dalam tiap² sistim birokrasi jang ku. Rusia mereka dikenal sebagai "pushers, peditters". Tugas mereka adalah untuk mendjadi rantara dalam melantjarkan djalannja birokrasi, hingga penjelesaian dokumen² dapat dikerdja- n dengan tjepat.

Dari tjontoh tersebut diatas kita dapat mena- k kesimpulan bahwa adanja terlalu banjak de- sion centres mengakibatkan dewasa ini belum pat dirumuskan suatu kebidjaksanaan jang nkrit dalam bidang ekonomi jang sifatnja mel- eluruh. Suatu "integrated economic policy" rus meliputi bidang² keuangan, produksi, per- gangan dalam dan luar negeri, komunikasi (ter- susuk pengangkutan, pelabuhan², mass media, asarana) dengan luar negeri. Kebidjaksanaan am bidang² ini harus merupakan suatu inte- ted economic policy karena tiap² kebidjaksa- an pada tiap² bidang merupakan sjarat² dan engkap dari kebidjaksanaan tiap² bidang.

Mereka mempunyai interelasi satu sama lain, sa- ling djalin mendjalin, saling menjokong, mem- bantu, melengkap, mendorong dan mempertjepat.

Export drive tidak akan berdjalan lantjar bila kebutuhan akan kredit dan keuangan tidak diatur dengan baik. Demikian pula tingkat harga erat berhubungan dengan tingkat disparita. Ekspor setjara fisik tidak akan berdjalan bilamana pengangkutan antara daerah produksi dan daerah ekspor tidak berdjalan, demikian pula pengang- kutan antara outports dan mainport. Djangan pula dilupakan komunikasi, seperti surat menjurat, tilgram, pengiriman uang dan sebagainya. Bukan sadja penting sebagai "outflow of export goods", akan tetapi sebagai alat² "inflow of import goods" jang diperlukan oleh berbagai aparat produksi kita. Karena penghambatan dari penjaluran atau pengangkutan setjara fisik berarti pula pem- berian kemungkinan kepada para spekulan atau manipulators untuk mengambil kesempatan ka- rena adanja hambatan² tersebut.

Selandjutnja dalam bidang produksi kita harus djuga memperhatikan kebidjaksanaan jang selaras dengan integrated economic policy. Rentjana im- por harus diarahkan kepada bidang produksi, dan harus lebih dispesifisir untuk bagian produksi jang mana. Dalam situasi sekarang jang hendak- nja diberikan priorita adalah sektor pangan dan komunikasi. Pengkonsentrasian dari devisa jang sudah langka itu kepada dua sektor ini akan memberikan suatu "verlichting" dan akan meng- akibatkan suatu pelantjaran setjara fisik dari- pada bahan² ekspor. Kendaraan dapat diberikan spareparts jang diperlukan, pelajanan di pelabu- han² harus diperhatikan. Kebutuhan akan satu komando di pelabuhan dirasakan sekali. Kapal² kita harus lebih banjak berlajar daripada ber- tjokol di pelabuhan karena tidak diberikan laja- nan atau service jang semestinja. *Semua ini mem- punjai hubungan jang erat dengan usaha pemben- dungan inflasi.*

Peningkatan pendapatan dan usaha² kearah kese- imbangan dalam budget negara akan sia² bilamana dalam kelima bidang itu tidak didjalankan suatu integrated policy. Karena itulah kebidjaksanaan ekonomi jang diintegrasikan harus pula merupa- kan suatu keseluruhan jang harus dilaksanakan sebagai suatu kesatuan menjeluruh dan pelaksa- naannja harus dilakukan dengan setjara konsek- wen, tanpa memberikan kompromi kepada "ves- ted interest" dalam bentuk apapun, karena sifat vested interest dapat kita lihat dalam bentuk eko- nomis, tehnik, administratif, politis, birokratis dsb. Semuanja dilaksanakan atas dasar disiplin nasio- nal jang meliputi semua unsur rakjat.

C.V. „NAROTAMA”

EXPORTERS, IMPORTERS & GENERAL AGENTS

DJALAN PERNIAGAAN 46

TELEPON : 23062 - 21282 - 21686

DJAKARTA KOTA

Cables : NAROTAMA DJAKARTA

EXPORT :

- * **COPRA**
- * **RUBBER**
- * **PEPPER**
- * **COFFEE**
- * **LUMBER**
- * **NUTMEGS**

IMPORT :

- * **ALL KINDS OF COMMODITIES**

KEWADJIBAN PENDAFTARAN

u n t u k

Perwakilan² Perusahaan² Asing di Indonesia

1. Berhubung banjaknja Kantor² Perwakilan Perusahaan² Asing jang telah dibuka di Indonesia dan perlu dilakukan pengawasan dan penertitatan atas perwakilan² tersebut, maka dengan Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 093/MPDN/1965 tertanggal 3 Djuli 1965 telah ditetapkan kewajiban pendaftaran bagi Perwakilan² Perusahaan Asing di Indonesia", baik bersifat perorangan maupun badan hukum.

Tarif Pendaftaran Perwakilan Perusahaan

ng.

Dengan Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri tanggal 7 September 1965 No. 0142/LN/SK/65 telah ditetapkan tarif pendaftaran Perwakilan Perusahaan² Asing di Indonesia, jaitu **2 tahun** Perwakilan Perusahaan Asing jang bersangkutan membajar **uang pendaftaran sebesar 25.000.— (dua puluh limaribu rupiah)** selama pendaftaran tersebut berlaku untuk setahun penuh sebagian tahun dengan tjatatan bahwa :

Bagi perwakilan jang mempunyai **status Nasional** diwajibkan membajar dalam **mata uang rupiah**;

Bagi perwakilan jang **berstatus asing** diwajibkan untuk membajar **nilai lawan rupiah** jaitu dengan kurs Rp. 250,— sama dengan US\$ 1.—.

Untuk melaksanakan keputusan² Menteri tsb. ini, Direktorat Hubungan Perdagangan Luar Negeri dan Direktorat Pengadaan dan Penjaluran telah menetapkan ketentuan² pelaksanaannja, anlain :

Dengan „Perwakilan Perusahaan Asing” dimaksudkan tiap badan hukum dan/atau perorangan di Indonesia jang mewakili setjara sah satu atau beberapa perusahaan asing jang berkedudukan di luar negeri, untuk kegiatan sebagai berikut :

1) memberikan djasa² dalam bentuk mengurus soal² administrasi perdagangan/perbankan dan mengirimkan laporan situasi pasaran di Indonesia setjara berkala kepada perusahaan asing di luar negeri;

(2) memberi penerangan tentang produksi/distribusi hasil industri dari perusahaan asing jang bersangkutan;

(3) memberi petunjuk², pendidikan dan/atau penerangan² dalam lapangan tehnik produksi dan/atau usaha² perekonomian umumnja atas usaha dari satu atau beberapa perusahaan asing di luar negeri, pula dalam rangka pelaksanaan kerdjasama antara Indonesia dan Negara Asing jang bersangkutan dalam lapangan² tersebut.

b. Pendaftaran dilakukan pada Direktorat Hubungan Perdagangan Luar Negeri (menurut formulir pendaftaran khusus untuk keperluan itu).

c. Didalam hal Perwakilan Perusahaan Asing jang bersangkutan ternyata mempunyai **tudjuan perdagangan** atau disamping tugasnja seperti ditetapkan dalam Pengumuman Bersama (DHPLN-DIPEN) itu bertudjuan pula untuk berdagang, maka Perwakilan tersebut diwajibkan mendaftarkan diri pada Perwakilan Departemen Perdagangan di Daerah Tk. I jbs.

d. Pendaftaran pada Perwakilan Departemen Perdagangan tersebut diatas berlaku sebagaimana biasa menurut ketentuan² dan sesuai dengan prosedur termaktub dalam peraturan² pelaksanaan Undang² Penjaluran Perusahaan „Bedrijfs-regelmenteringsordonnantie 1934” dan Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian tanggal 3 September 1957 2077/M/Perind.

No. _____ untuk usaha² perdagangan.
2430/M/Perdag.

e. Kepala Perwakilan Departemen Perdagangan mengawasi agar pendaftaran dari Perwakilan² Perusahaan Asing jang bersangkutan dilakukan sebaik-baiknja.

f. Bagi Perwakilan² Perusahaan Asing jang akan membuka kantornja di Indonesia diwajibkan segera mendaftarkan diri selambat²nja sebulan sesudah tanggal pengangkatan/penundjukan sebagai wakil perusahaan asing. Penutup.

K A P A S DAN HUBUNGANNJA DENGAN INDUSTRI PEMINTALAN DAN PERADJUTAN DI INDONESIA

Pembijtaraan perihal kapas adalah erat hubungannya dengan Industri Pemintalan dan Peradjudtan jang ada di Indonesia; kedua hal tersebut adalah ibarat air dengan ikan tersebut terpisah satu dengan jang lainnya.

Dimana sadja perusahaan pemintalan dan peradjudtan di Indonesia jang koordinasinja dilakukan oleh Badan Pusat Koordinasi Perusahaan Daerah (BAPUSKOPDA).

Sebenarnya sudah sedjak lama industri pemintalan dan peradjudtan ada di Indonesia jaitu suatu keradjudtan tangan jang telah dipunjai nenek-mojang bangsa Indonesia, jang pekerdjaan itu sudah berhasil baik sedjak abad ke-XIX.

Perkembangan setjara menjeluruh, seperti sekarang belum pernah dialami, sungguhpun untuk mentjukupi kebutuhan seluruh rakjat Indonesia jang seratuslima djuta djiwa jang berarti bahwa membutuhkan teksil 10⁵ djuta × 8 meter harus dapat kita produser sendiri dalam waktu satu atau dua tahun; beberapa tahun berikutinja harus telah mendjadi sepuluh meter teksil tersedia untuk tiap djiwa, duabelas meter, empatbelas meter tiap djiwa dan seterusnya.

PJM Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Pelindung Agung Musjawarah Sandang telah komandokan menanam kapas, oleh karena isi daripada kemerdekaan ialah ke-BERDIKARI-an. Ini adalah kata² mutiara jang patut ditjatat oleh setiap rakjat Indonesia, dan setjara langsung melaksanakannya, terutama sekali oleh pengusaha² industri sandang dan petani kapas. Kami yakin dengan masih banjarknja tanah² jang tidak ditanami kapas, maka perindustrian² jang membutuhkan kapas pasti terpenuhi.

Industri² pemintalan dan peradjudtan di Indonesia jang koordinasinja dilakukan oleh BAPUSKOPDA jang sudah ada, jaitu :

1. Pabrik Pemintalan Kapas Tjilatjap
2. Pabrik Pemintalan Djantra Semarang
3. Pabrik Pemintalan Rami Siantar
4. Pabrik Tenun Garut Ampera I
5. Pabrik Finishing Madjalaja
6. Pabrik Tenun Trikora Serang
7. Pabrik Tenun Muriatex Kudus
8. Pabrik Tenun Infitex Klaten
9. Pabrik Tekstil Kamadaja
10. Pabrik Alat² Kesehatan Kasa Husada Surabaya

11. Pabrik Radjut Pelopor Madiun
12. Pabrik Tenun Balitex Denpasar
13. Pabrik Tekstil Indonesia Tegal
14. Industri Pertenunan dan Peradjudtan Pabrik Tenun Terpal "Ratih" Surabaya.

Keempatbelas pemintalan dan peradjudtan atas membutuhkan kapas kasar, rami raw benang tenun kapas khusus jang halus, benang elastik, nylon speen silk SF, tjat² teksil, spandeks, parts, bahan kimia teksil dan badan pembuat bus.

Perusahaan Pertekstilan Daerah memproduksi setiap tahunnja matjam² teksil, sarong, handkaoskaki pandjang/pendek, singlet, T/V shirt, benang tenun kapas, benang SF dan rami, kanvas dan webbrug.

Untuk memproduksi bahan/baku/barang² tersebut diatas diperlukan bahan² baku, dimana rakjat petani diharapkan dapat menghasilkan berupa kapas sedjumlah 45.658 ton setiap tahunnja, rami sedjumlah 350 ton, raw staple fibre 100 ton, benang tenun, tjat teksil, kimia tekstil, cambrics primisinja dsb.

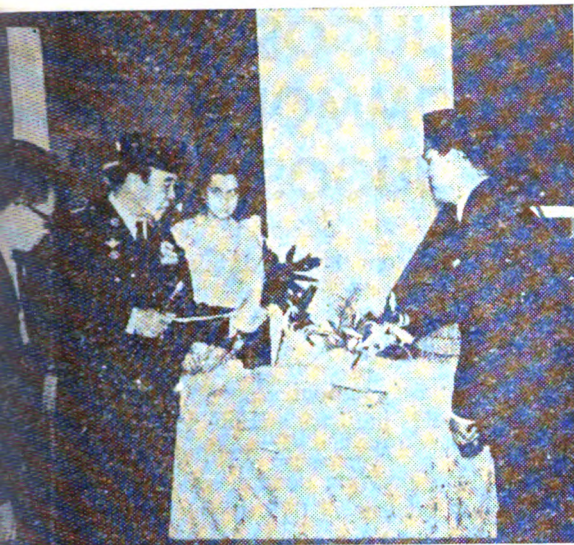
Keperluan tersebut diatas berdasar pada a. produksi jang sekarang ada dan berdjalan lanjut seluruhnja.

Tjara pengadaan

Tjara pengadaan kebutuhan bahan baku dan tenaga negeri perlu adanja kerdjasama jang erat antara rakjat dan pemerintah, dan kerdjasama ini disertai djuga oleh rasa kesadaran jang timbul karena optimis atas produksi pertanian jang bertalian dengan pembelian kapas impor disesuaikan dengan produksi kapas dalam negeri.

Perusahaan² dan koperasi² sejogjanja tidak lepas dari rasa tanggungjawab dengan mentegrasikan diri pada petani² kapas dan membimbing langsung oleh instansi jang berhubungan dengan masalah perkapasan.

Tidak sekedar begitu sadja, tetapi langkah jang lebih djauh lagi, impor kapas ditiadakan menurut djumlah produksi jang tersedia didalam negeri, dan pada suatu waktu tertentu impor kita hentikan sama sekali, karena BERDIKARI-an jang sebenarnya itu ialah memberikan proteksi kepada petani produser kapas. Ini adalah pendorong jang perlu ada bagi para petani kapas saat ini dan masa² jang akan datang.



Presiden sedang memperhatikan hasil produksi OPS-Mesin.

(Gb. Bapuskopda).

mbungan hal. 8.)

ga sandang-pangan, minjak tanah, bensin dan an² pokok lainnja, selain disebabkan oleh faktor² nomis, djuga telah terbukti karena adanja usaha² ot dan subversi dari golongan gerakan kontrev September bersama petualang ekonomi lainnja. Kita mengetahui pula, bahwa didalam konfrontasi nomi ini, fihak musuh nekolimpun dengan pelni muslihatnja selalu melakukan subversinja diua sektor ekonomi. Dan kitapun tahu bahwa akan Kontrev 30 September sebagai musuh ulusi tetap meneruskan dan meningkatkan sabot subversinja pula disemua bidang ekonomi. Kontrev 30 September telah mengchianati Presiden/impin Besar Revolusi Bung Karno beserta ran²nja; telah mengchianati doktrin² revolusi Lima Azimat Revolusi, Kontrev 30 September merusak dan menodai kepertjajaan rakjat, baik terorganisasi maupun rakjat Indonesia seluruh-Gerakan kontrev 30 September telah mefitnah jurit² revolusi dan ABRI dan telah melakukan or jang sangat kedji dan biadab. Maka kitapun c sangsi, bahwa gerakan kontrev 30 September k segan² pula untuk bekerdja-sama atau sedjalan an fihak musuh nekolim.

leh karena itu kami minta perhatian kepada sep alat kekuasaan negara semua aparatur pemehan dan seluruh rakjat, untuk lebih waspada adap segala kegiatan² subversi ekonomi tersebut an disertai tindakan² jang positif dan konkrit,

elain potensi² politik dan militer, maka potensi ekonomi dari Gerakan kontrev 30 September lan kaki tangannja, harus dibersihkan pula ampai keakar-akarnja oleh ABRI bersama-sama rakjat.

Melaksanakan dan mengamalkan semua kebijaksanaan Pemerintah dengan sebaik²nja, baik

Beras adalah kebutuhan pokok bagi tudjuhpu-luhlima persen rakjat Indonesia; begitu pula kapas adalah kebutuhan pokok bagi seluruh unit industri peradjuan/pemintalan seluruh Indonesia jang perlu ada pada setiap saat. Djumlah produksi itu adalah tergantung seluruhnja kepada kita seluruh rakjat jang tjinta kepada BERDIKARI dalam arti kata djuga melaksanakannja dengan tjara bekerdja keras, karena kemerdekaan pun kita peroleh dengan pengorbanan jang bukan sedikit dan dengan bekerdja keras.

Revolusi kita belum selesai, karena djika kita tindjau sumber² kekuatan perekonomian kita bukan terdiri dari bidang sandang sadja, tetapi banjak lagi jang lain sejogianja BERDIKARI dan telah dilaksanakan.

Bertalian dengan penanaman kapas, tanahnja tjukup tersedia, luasnja, suburnja, tenaga kerdja, jah lengkap semuanya.

Terachir ialah rasa optimistis bahwa berdikari jang kita idam²kan pasti tertjapai. Onward no retreat. Ever onward, never retreat. Madju terus, pantang mundur. Tuhan bersama kita.

(B. TULIS-BAPUSKOPDA)

dalam bidang konfrontasi ekonomi terhadap nekolim Malaysia-Singapura, maupun program² ekonomi lainnja, terutama dibidang sandang-pangan, produksi dan ekspor.

Untuk merealisir social responsibility, maka social control, social support dan social participation tetap diharapkan dari masyarakat tetapi hendaklah dilakukan dengan tjara² jang konstruktif dan positif.

- c. Mengamankan dan menjelamatkan semua sektor ekonomi dari usaha² sabot dan subversi, jaitu dibidang produksi, distribusi, perdagangan dan lalu lintas ekonomi-keuangan lainnja.
- d. Memelihara dan meningkatkan militansi dan semangat rakjat, tidak sadja untuk penganjangan nekolim, tetapi djuga untuk pengerahan tenaga kerdja dibidang produksi dan pem-
- e. Membersihkan semua aparatur ekonomi, parpol, ormas dan pengusaha² swasta dari oknum subversi, kontrev dan pengatjau² ekonomi, jaitu dengan menempuh tata-tjara hukum negara jang berlaku agar ditindak dengan tegas oleh Pemerintah.

Achirnja Menteri Kepala Staf KOTOE mengadajak seluruh rakjat jang progresif revolusioner, pendukung dan pembela setia Revolusi 17 Agustus 1965, untuk bersama-sama dan bahu-membahu dengan Pemerintah setjepat-tjepatnja memulihkan ketertiban dan keamanan dibidang ekonomi dan penghidupan rakjat, jang telah lama dikatjau oleh fihak musuh² revolusi. Dengan segera tertjiptanja ketentraman, ketenangan dan ketahanan dihome front, maka kita yakin, bahwa perdjolongan Dwikora segera dapat kita menangkan, dan penumpasan musuh² revolusi baik jang berada didalam negeri maupun jang di dalangi dari luar negeri segera dapat kita selesaikan.

PERDAGANGAN LUAR NEGERI JUGOSLAVIA DAN KEDUDUKAN EXPORT-COMMODITIES INDONESIA DIPASARAN JUGOSLAVIA

I. Perdagangan Luar Negeri Jugoslavia.

Perdagangan luar negeri Jugoslavia dari tahun ketahun ditandai oleh naiknya ekspor hasil² industri dan bahan² setengah jadi. Dalam pada itu impor bahan² reproduksi djuga selalu bertambah besar, sedang impor barang² konsumsi menurun. Sampai dengan bulan September 1964 ekspor Jugoslavia berdjumlah sebesar 188.740 djuta dinary dibanding dengan sebesar 168.309 djuta dinar *) untuk masa jang sama dalam tahun 1963. Sedang impornja berdjumlah sebesar 305.663 djuta dinar dibanding dengan sebesar 237.123 djuta dinar untuk waktu jang sama. Ternjata bahwa untuk masa sampai dengan bulan September 1964, ekspor Jugoslavia mengalami kenaikan sebesar 28,9% dibanding dengan apa jang terdjadi dalam masa jang sama dalam tahun 1963. Kenaikan impor itu terbesar terdjadi pada impor hasil² industri yakni dari seharga 182.379 mendjadi seharga 260.601 djuta dinar dalam masa sampai dengan September 1964 atau kira² sebesar 43,4%. Impor hasil² hutan naik dari seharga 359 djuta mendjadi sebesar 770 djuta dinar. Kenaikan impor hasil² industri jang meliputi sebesar 78.222 djuta dinar itu adalah merupakan 25,6% dari seluruh nilai impor Jugoslavia dalam masa sampai dengan bulan September 1964 jaitu sebesar 305.663 djuta dinar.

Neratja perdagangan luar negeri Jugoslavia dari tahun ketahun selalu mengalami defisit, yakni sbb. : (dalam djuta dinar).

	1960 :	1961 :	1962 :	1963 :	s/d Sep- tember 64
Ekspor	169.848	170.670	207.146	237.103	188.740
Impor	247.916	273.087	266.317	316.986	305.663

— 78.068 -102.417 -59.883 -79.883 -116.923

Perbandingan defisit neratja perdagangan luar negeri terhadap volume perdagangan luar negeri Jugoslavia adalah :

S/d September	Tahun	Persentase
1964	1963	19,7%
1963	1962	12,2%
1962	1961	12,5%
1961	1960	23,0%

Defisit neratja perdagangan luar negeri jang terbesar dalam masa sampai dengan September 1964 dibanding dengan dalam masa² tahun 1963 dan 1962 itu disebabkan oleh membesarnya demands didalam negeri jaitu akan bahan² reproduksi pada sektor industri dan akan barang² konsumsi dikalangan buruh² perusahaan dimana pada golongan tersebut terachir ini ada kenaikan pendapatan dan adanya pembebasan barang² konsumsi umum dari bea masuk pada awal tahun 1964.

*) US.\$ 1. = 300 Dinar

Susunan ekspor/impor ditilik dari tjabang produksinja adalah sbb. :

Hasil² perindustrian :

Untuk masa sampai dengan September 1964 ekspor hasil² industri adalah sebesar 78,6% dari seluruh nilai ekspor yakni meliputi sebesar 148.309 djuta dinar dibanding dengan sebesar 129.812 djuta dinar (atau sebesar 77,0% dari seluruh nilai ekspor) untuk masa jang sama dalam tahun 1963. Tjabang industri jang mengambil bagian dalam ekspor tahun 1964 ialah :

Nilai ekspor (djuta dinar) :

S/d Sept. 1964 : S/d Sept. 1963

Kategori	S/d Sept. 1964	S/d Sept. 1963
a. Metal manufacturing industry	21.961	19.116
b. Wood industry	20.931	19.168
c. Food processing industry	13.417	12.915
d. Textile industry	16.887	11.410
e. Shipbuilding	10.633	12.438
f. Electro technical industry	7.794	8.479
g. Tobacco industry	7.155	4.328
h. Hides and leather industry	7.472	5.823
i. Chemical industry	7.030	4.266
j. Non metallic minerals	5.764	4.300
k. Steel and iron industry	4.363	4.974
l. Paper industry	3.266	3.021
m. Kemudian menjusul hasil dari industri ² lain		

Kelihatan dari data² diatas bahwa pada umur ekspor hasil² dari tjabang² industry shipbuilding electrotechnical jang menurun. Dalam pada itu nilai hasil² industri untuk masa sampai dengan September 1964 adalah sebesar 85,3% dari seluruh nilai ekspor yakni meliputi sebesar 260.601 djuta dinar dibanding dengan sebesar 182.379 djuta dinar (atau sebesar 76,9% dari seluruh nilai impor) untuk masa jang sama dalam tahun 1963. Impor barang² industri terutama berasal dari tjabang² sbb. :

Nilai impor (djuta dinar) :

S/d Sept. 1964 : S/d Sept. 1963

Kategori	S/d Sept. 1964	S/d Sept. 1963
a. Metal manufacturing industry	83.907	62.164
b. Textile industry	35.788	24.947
c. Chemical industry	34.681	23.773
d. Steel and iron industry	30.193	18.984

Electrotechnical industry	15.194	12.200
Food processing industry	14.349	9.305
Non-ferrous industry	8.012	6.033
Coal and Coke	7.989	5.818
Crude oil production and refinery	6.990	4.865
Rubber industry	6.956	4.708
Non-metalic minerals	6.333	3.390
Hasil ² dari tjabang ² industri lainnja.		

Dari angka² ekspor/imp²or untuk masing² tjabang industri ternjata bahwa tjabang² industry jang teniil memproduksi hasil² untuk ekspor adalah bang hides and leather industry, tobacco industry, od industry dan shipbuilding industry. Disamping industri dari golongan tersebut diatas, terdapat pula industri jang memproduksi hasil² jang ditudjukan uk memenuhi kebutuhan didalam negeri; tetapi industri² tersebut djuga masih diharuskan meng-
por sebagian dari hasilnja guna memperoleh isen untuk dapat mengimp²or bahan² serta per-
tan jang diperlukannja.

Hasil² pertanian :

Untuk masa sampai dengan bulan September 1964 adalah sebesar 19,0% dari seluruh nilai ekspor jakni meliputi sebesar 257 djuta dinar dibanding dengan sebesar 34.656 djuta dinar (atau sebesar 20,6% dari seluruh nilai ekspor) untuk masa jang sama dalam tahun 1963.

Ekspor hasil pertanian jang terutama ialah livestock (hasil² penternakan) jakni meliputi nilai sebesar 26 djuta dinar. Ekspor livestock breeding adalah menempati tempat pertama dalam deretan ekspor Jugoslavia. Dilain pihak Jugoslavia masih mengimp²or pula hasil² pertanian dan jang terutama ialah gandum; kemudian menjusul bahan² man-
an (rempah²) dan buah²an.

Hasil² hutan :

Untuk masa sampai dengan bulan September 1964, ekspor hasil² hutan adalah sebesar 2,4% dari seluruh nilai ekspor jakni meliputi nilai sebesar 4 djuta dinar dibanding dengan sebesar 3.841 djuta dinar untuk masa jang sama dalam tahun 1963. Ekspor hasil² hutan jang terutama adalah ter-
dari kaju. Meskipun demikian, Jugoslavia djuga
h mengimp²or kaju² bermutu tinggi demi untuk
enuhi kebutuhan bahan veneer.

alam pada itu struktur perdagangan luar negeri Jugoslavia memperlihatkan pula tendens dimana
me ekspor hasil² industri memperoleh kema-
n relatif lebih besar daripada ekspor hasil² per-
n dan hutan. Ditilik dari tudjuannja maka hasil²
stri jang diekspor terdiri dari crude materials
semi finished products (31,5%), manufactured
s for reproduction (9,1%), alat² transport
(%), clothing and footwear (5,4%), textile artic-

les (3,1%), berbagai-bagai consumers goods (3,0%), obat²an (2,9%), mesin² (2,0%), kemudian menjusul djenis barang lainnja. Dipihak lain, imp²or reproductive materials adalah sebesar 65,4% dari seluruh nilai imp²or terdiri dari bahan² mentah, se-
tengah djadi mineral fuels dan manufactured goods untuk produksi lebih lanjut.

Kemudian menjusul imp²or barang² investment/ peralatan jaitu sebesar 20% dari seluruh nilai imp²or. Dari barang tersebut terachir ini jang terbesar adala-
lah mesin², kemudian menjusul electric motor, per-
alatan², metal working machineries dan alat² trans-
port. Sementara itu imp²or barang² konsumsi jang terbesar adalah gandum, kemudian menjusul tekstil, obat²an dan pharmaceutical products, cosmetics, kopi, tjoklat dan tembakau.

Regional approach dari perdagangan luar negeri.

Dibawah ini dipetikkan dari bagian pendahuluan Undang² Dasar Jugoslavia tentang dasar² politik luar negeri Jugoslavia pada umumnja dan politik perdagangan luar negeri chusunsja dengan djudul „Basic Principles” :

Proceeding from the conviction that peaceful coexistence and active-co-operation among states and nations, without distinction as to social system, are an indispensable condition for peace and social progress in the world, Jugoslavia bases its international relations on the principles of respect for national sovereignty and equality, a non-interference in the internal affairs of other countries, the peaceful settlement of international disputes, and socialist internationalism..... In order to implement these principles Jugoslavia advocates the establishment and development of all forms of international cooperation conducive to the consolidation of peace, strengthening of mutual respect and friendship among peoples and states and their repproachment : the broad st and freest meterial and spiritual exchange, the freedom of information and the development of other relations contributory to the realisation of common economic, cultural and other interests of states, nations and peoples, and particularly to the national cooperation and general social progress... the repudiation of the use of force or threat of force in international relations..... the right of each nation freely to determine and build its own free choice..... the development of such interna-
tional cooperation as assure equality economic relations in the world, sovereign disposal of national economic wealth, and the creation of conditions for the rapid development of under-
developed countries.....

Sampai dengan pertengahan pertama tahun 1964, Jugoslavia mempunjai/mengadakan hubungan da-
gang/kerdjasama ekonomi dengan 72 negara jaitu dengan negara² Eropa Barat/Timur sebanjak 23, dengan negara² di Asia sebanjak 15, dengan negara² di Afrika sebanjak 19, dengan negara² di Amerika

Slatan/Tengah sebanjak 11, dengan negara² di Amerika Utara sebanjak 2 dan dengan negara² Oceania sebanjak 2. Dari ke 72 negara tersebut, Jugoslavia mengadakan clearing arrangement dengan 25 negara : yakni semua negara² Eropa Timur dengan Austria, Switzerland, India, Afganistan, Pakistan, UAR, Aldjazair, Chana, Mali, Guinea dan Tunisia, Brazilia dan Colombia.

Seperti halnya dengan tahun² jang lalu, djurusan dari perdagangan luar negeri Jugoslavia sampai dengan bulan September 1964 adalah terlihat seperti dibawah ini :

Negara² tudjuan/asal :	Ekspor :	Impor :
	(djuta dinar)	(djuta dinar)
Eropa Barat	87.258	128.472
Eropa Timur	56.042	80.256
Asia	20.250	20.423
Amerika Utara	11.273	43.897
Afrika	9.588	14.544
Amerika Selatan	4.289	11.299
Oceania	40	6.772

a). Eropa Barat :

Hingga kini negara² Eropa Barat masih merupakan partner Jugoslavia jang terutama dalam bidang hubungan perdagangan luar negeri. Volume lalu-lintas perdagangan antara Jugoslavia dengan negara² di Eropa Barat selalu naik dari tahun ketahun. Sampai dengan bulan September 1964, ekspor Jugoslavia kenegara² Eropa Barat berdjumlah sebesar 87.258 djuta dinar atau sebesar 46.8% dari seluruh nilai ekspor, sedang impornja berdjumlah sebesar 128.472 djuta dinar atau sebesar 68% dari seluruh nilai impor. Negara² partner jang terutama ialah : Italia, Djerman Barat, Inggris, (USSR menempati tempat kedua setelah Italia, baru menjusul Djerman Barat dan Inggris). Ekspor Jugoslavia kenegara² Eropa Barat terdiri dari foodstuff, rawmaterials, manufactured goods dan kemudian menjusul bagian ketjil, finished goods seperti mesin² dan alat² transpor. Impor Jugoslavia terdiri dari mesin² alat² transpor, manufactured goods, bahan² kimia dan bahan² mentah.

b). Eropa Timur :

Lalu-lintas perdagangan Jugoslavia dengan negara² Eropa Timur memperlihatkan tendens naik sedjak tahun 1962 hingga sekarang. Sampai dengan bulan September 1964 ekspor Jugoslavia kenegara² Eropa Timur berdjumlah seharga 56.042 djuta dinar atau sebesar 80,6% dari seluruh nilai ekspor, sedang impornja berdjumlah sebesar 80,256 djuta dinar atau sebesar 26,2% dari seluruh nilai impor.

(Lalu lintas perdagangan antara Jugoslavia dengan negara² Eropa Timur untuk masa sampai dengan September 1963 adalah : Ekspor sebesar 42.937 djuta dinar dan impor sebesar 46.215 djuta dinar). Membesarnja volume perdagangan antara Jugoslavia dengan negara² Eropa Timur itu adalah sedjalan de-

ngan membaiknja hubungan politik dalam beberapa tahun terakhir ini serta dipergunakannja sistim pembayaran clearing. Dalam pada itu selama dua tahun terakhir ini terlihat pula makin meluasnja kerja sama ekonomi dibidang industri antara Jugoslavia dengan negara Eropa Timur yakni USSR, Polandia, Djerman Timur, Tjekoslowakia dan Rumania. Dari negara Eropa Timur partner dagang Jugoslavia berturut-turut ialah : USSR, Polandia, Djerman Timur, Tjekoslowakia, Hongaria, Bulgaria, Rumania. Dari negara Eropa Timur partner dagang Jugoslavia berturut-turut ialah : USSR, Polandia, Djerman Timur, Tjekoslowakia, Hongaria, Bulgaria, Rumania. Ekspor Jugoslavia kenegara² Eropa Timur terdiri dari mesin² alat² transpor, chemical products, mineral fuels dan foodstuff.

c). Asia/Afrika :

Selama ini volume lalu-lintas perdagangan antara Jugoslavia dengan negara² Asia-Afrika memperlihatkan membesar dari tahun ketahun. Sampai dengan bulan September 1964, ekspor Jugoslavia kenegara² Asia berdjumlah sebesar 20.250 djuta dinar atau sebesar 10,7% dari seluruh nilai ekspor, sedang impornja berdjumlah sebesar 20.423 djuta dinar atau sebesar 6,6% dari seluruh nilai impor. Ekspor Jugoslavia kenegara² Afrika berdjumlah sebesar 9.588 djuta dinar atau sebesar 5,0% dari seluruh nilai ekspor, sedang impornja berdjumlah sebesar 14.544 djuta dinar atau sebesar 4,7% dari seluruh impor.

Dibanding dengan masa jang sama dalam tahun 1963, volume perdagangan Jugoslavia kenegara² Asia dalam masa sampai dengan September 1964 adalah naik yakni : ekspor sebesar 14.738 djuta dinar atau sebesar 20.250 djuta dinar, sedang impornja sebesar 19.963 djuta dinar menjadi 20.423 djuta dinar. Dalam pada itu ekspor Jugoslavia kenegara² Afrika mengalami kemunduran yakni sebesar 13.383 djuta dinar dalam masa sampai dengan bulan September 1963 menjadi sebesar 9.588 djuta dinar untuk masa jang sama dalam tahun 1964; tetapi impornja membesar jaitu dari sebesar 10.155 djuta dinar dalam masa sampai dengan September 1963 menjadi sebesar 14.544 djuta dinar dalam masa sama tahun 1964;

Tidak sebagaimana biasanja dimana neratja perdagangan Jugoslavia dengan negara² partner selamanya mengalami defisit (negatif), maka dengan beberapa negara di Asia dan Amerika Selatan Jugoslavia memperoleh surplus neratja perdagangan yakni dengan Asia dengan India, Indonesia dan Pakistan, sedang dengan negara di Amerika Selatan ialah dengan Brazillia. (neratja perdagangan Jugoslavia dengan negara² di Afrika adalah negatif).

Diantara negara² jang sedang berkembang, partner dagang Jugoslavia jang terutama berturut-turut ialah : India (ekspor Jugoslavia sebesar 6.939 djuta dinar, dan impor sebesar 4.435 djuta dinar). U.S.A. (ekspor sebesar 3.197 djuta dinar, dan impor sebesar 6.037 djuta dinar), Brazillia (ekspor seba-

31 djuta dinar, dan impor sebesar 3.103 djuta (ar), Indonesia (ekspor sebesar 4.895 djuta dinar n impor sebesar 1.405 djuta dinar), Israel (ekspor sebesar 1.969 djuta dinar dan impor sebesar 2.364 ita dinar), Pakistan (ekspor sebesar 2.012 djuta ar, dan impor sebesar 1.816 djuta dinar, kemu- n menjusul negara² lain. Dibanding dengan dalam un 1963, dalam tahun 1964 telah terdjadi geseran kedudukan partner dagang Jugoslavia tu dimana dalam tahun 1963 partner² tersebut turut² adalah : India, UAR, Indonesia, Argen- a, Brazillia, Israel, Irak, sementara perdagangan tara Jugoslavia-Pakistan belum berarti. Ekspor goslavia kenegara² Asia-Afrika terdiri dari mesin², t² transpor, textile, foodstuff, bahan² reproduksi, emical products dan fuel. Sedang impornja terdiri ri raw materials, (bidji besi, oil seed, karet, kapas), han² pangan seperti kopi, tjoklat beras, rempah², lit, dsb.

Amerika Selatan :

Lalu-lintas perdagangan antara Jugoslavia dengan gara² Amerika Selatan selalu mengalami fluctuasi. lam pada itu untuk masa sampai dengan bulan ptember 1964, lalu-lintas perdagangan antara goslavia dengan negara² Amerika Selatan jakni k ekspor berdjumlah sebesar 4.289 djuta dinar n impor sebesar 11.299 djuta dinar dibanding ngan ekspor sebesar 3.674 djuta dinar dan impor esar 6.807 djuta dinar untuk masa jang sama lam tahun 1963. Partner dagang Jugoslavia jang utama berturut² jalah Brazillia, Argentina dan ba. Seperti telah disinggung diatas, Brazillia ada- a partner dagang ketiga antara Jugoslavia dengan gara² jang sedang berkembang. Ekspor Jugoslavia enegara² Amerika Selatan terdiri dari mesin², alat², nspor, chemical products dan foodstuff. Sedang pornja terdiri dari raw materials (bidji besi, minjak antah) dan foodstuff (kopi, gula).

Amerika Utara :

Partner dagang Jugoslavia jang terutama diantara gara² di Amerika Utara jalah Amerika Serikat. mpai dengan bulan September 1964 ekspor goslavia ke Amerika Utara berdjumlah sebesar 316 djuta dinar, sedang impornja berdjumlah 316 djuta dinar (ekspor sebesar 5,4% dari seluruh ai ekspor, sedang impor sebesar 13,2% dari se- uh nilai impor). Dibanding dengan dalam tahun elumnja, ekspor Jugoslavia ke Amerika Serikat lah naik jakni sebesar 10.316 djuta dinar diban- g dengan sebesar 9.678 djuta dinar untuk masa g sama dalam tahun 1963. Dilain pihak impornja nurun jakni sebesar 49.577 djuta dinar dalam sa sampai dengan September 1963 mendjadi esar 40.670 djuta dinar dalam masa jang sama un 1964. Menurunnja impor Jugoslavia dari erika Serikat dalam tahun 1964 ini disebabkan h dihentikannja bantuan jang berasal dari Surplus griculture Products dalam rangka Food and Peace ogram. Sementara itu kedudukan Amerika Serikat

sebagai partner Jugoslavia nomor tiga diwaktu-waktu jang lalu, dalam tahun² 1963 dan 1964 telah ter- geser mendjadi partner nomor empat setelah Itali, USSR, Djerman Barat.

Ekspor Jugoslavia ke Amerika Serikat terdiri dari hasil² industri berupa bahan makanan, tembakau, chemical products, textile, furnitures dan raw materials. Sedang impornja terutama terdiri dari mesin², alat² transport, mineral fuel dan minjak lumas, serta hasil² pertanian (gandum dan kapas) jang diimpor dalam rangka bantuan Food for Peace Program.

Dibawah ini berturut-turut adalah partner dagang Jugoslavia (s/d September 1964);

Negara tudjuan/asal : Nilai dalam djuta dinar : EROPA BARAT/

TIMUR	Ekspor	Impor
1. Italia	30.657	40.209
2. USSR	23.920	22.730
3. Djerman Barat	16.453	25.522
4. Inggris	13.192	15.968
5. Djerman Timur	10.196	16.559
6. Polandia	7.878	12.881
7. Tjekoslowakia	7.378	18.646
8. Austria	7.033	7.616
9. Hongaria	4.771	7.213
10. Perantjis	4.137	10.845
11. Swiss	3.460	4.859
12. Junani	3.220	2.881
13. Rumania	1.899	2.227
14. Negeri Belanda	1.877	6.413
15. Negara ² lainnja.		

AMERIKA UTARA :

1. Amerika Serikat	10.316	40.670
2. Canada	957	3.227

ASIA :

1. India	6.939	4.435
2. Indonesia	4.896	1.405
3. Pakistan	2.012	1.863
4. Israel	1.969	2.364
5. Turkey	956	1.061
6. Negara ² lainnja.		

AFRIKA :

1. UAR	3.197	6.073
2. Aldjazair	948	1.035
3. Marocco	283	1.473
4. Ethiopia	333	1.118
5. Tunis	854	699
6. Negara ² lainnja.		

AMERIKA SELATAN :

1. Brazillia	3.131	3.103
2. Argentina	50	4.896
3. Negara ² lainnja.		

HUBUNGAN DAGANG/EKONOMI JUGOSLAVIA - INDONESIA :

Hubungan dagang/ekonomi antara Indonesia- Jugoslavia dalam tahun 1964 didasari oleh

Agreement on Economic Cooperation and long Term Trade Agreement yang ditanda tangani di Djakarta pada tanggal 29 Djuli 1961 (berlaku sampai dengan akhir tahun 1964), serta Protocol in the Exchange of Goods yang ditanda tangani di Beograd pada tanggal 13 Mei 1964. Dokumen tersebut terakhir ini mengatur lalu-lintas perdagangan hanya untuk tahun 1964. Sebagai pengganti dari Agreement on Economic Cooperation and Long Term Trade Agreement tersebut diatas yang terakhir pada akhir tahun 1964, pada tanggal 19 Djanuari 1965 di Djakarta telah ditandatangani Agreement (baru) di Economic Cooperation and Long Term Trade Agreement yang berlaku sampai dengan akhir Desember 1967.

KEDUDUKAN EXPORT COMMODITIES DARI INDONESIA DIPASARAN JUGOSLAVIA :

Beberapa matjam commodities (bahan² dasar berupa baik hasil² bumi maupun tambang) yang diimpor oleh Jugoslavia meskipun tidak semuanya berasal dari Indonesia ialah :

Beberapa hasil bumi/tambang yang diimpor oleh Jugoslavia dalam tahun 1963 :

	Djumlah impor :	Diimpor dari Indonesia :	kg.
Ikan asin segar	12.165.748	—	—
Ikan asin kering	649.450	—	—
Gula tebu	5.649.651	—	—
Kopi	17.770.012	49.663	—
Bidji Tjoklat	9.591.577	—	—
T e h	275.831	—	—
L a d a	664.699	20.320	—
Cassia-vera	206.941	206.941	—
Vanillia	11.424	—	—
P a l a	23.630	17.070	—
Kulit Lembu basah	21.974.900	—	—
Kulit Lembu kering	552.850	50.246	—
Kulit Kambing kering	3.615.138	—	—
Katjang Tanah berkulit	246.270	—	—
Katjang Tanah tak berkulit (Ose)	360.835	—	—
Kopra	3.960.471	2.951.315	—
Bidji Sawit	1.455.148	—	—
Widjen	226.876	—	—
Minjak Kelapa Sawit	1.059.876	—	—
Karet alam	15.119.905	11.268.935	—
Latex amoniacal	984.504	—	—
Walnut Veneer logs	421.005	—	—
Vencer logs exotic	2.522.249	—	—
Sawn hard wood	88.614	—	—
Serat sisal	5.611.426	—	—

Serabut kelapa	266.764	—
Bidji mangan	35.922.182	—
Copper scrap/ fillings	4.504.705	—
Sulphur mineral	12.672.945	—
Gum/Damar	134.567	—
Bambu	3.419	—
Bahan obat ² an dari tanaman	28.509	—
Kinine	1.562	—
Rumput laut/kapok	7.487.801	Dalam th. 1963 ini Jugoslavia tidak mengimpor dari Indonesia
Timah	2.184.409	1.473.209

Dalam pada itu dalam tahun 1964 dari 17 matjam export commodities sebagaimana tertjantung dalam daftar Protocol (jaitu daftar barang² yang diekspor oleh Indonesia ke Jugoslavia yang meliputi hasil² sbb. :

Karet perkebunan/rakjat, lada hitam/putih, cassia vera, pala, kopi robusta, teh, minjak kelapa sawit, bidji sawit, kapok, kulit kerbau, kopra, rotan, katjang timah dan bidji mangan) hanya dapat direalisasikan sebanyak 9 matjam sadja (jaksi meliputi kopi, lada hitam, pala, kulit, kopra, karet alam, copper scrap, rumput laut dan kapok, timah) yang nilainya berjumlah 2.054,5 djuta dinar.

Mengenai kemampuan meng-absorbsi akomodasi foodstuff commodities oleh Jugoslavia adalah terbatas disebabkan oleh ketjilnja djumlah penduduk (± 20 djuta orang), djuga sedjalan dengan perkembangan industri di Jugoslavia maka pemasukan bahan² mentah/reproductive materials kepasar Jugoslavia akan lebih mendapat ruang daripada kalau memasukkan foodstuff commodities. Dibawah ini adalah uraian commodities per commodity.

a). Karet :

Dalam tahun 1964 j.l. Jugoslavia telah membeli karet dari Indonesia (tidak diperintji mutunjaja) sebanyak djumlah 10.000 ton, sedang dalam tahun 1963 sebanyak djumlah 11.369 ton. Dalam pada itu daftar II Protocol mentjantumkan angka ekspor karet oleh Indonesia sebesar 10.600 ton yakni 3.600 ton karet perkebunan dan 7.000 ton karet rakjat. Hingga tahun 1964 ini Indonesia adalah supplier karet alam kepada Jugoslavia yang pertama dan terbesar. Impor karet alam oleh Jugoslavia seluruhnja berdjumlah sebanyak 15.120 ton dalam tahun 1963 dibandingkan dengan sebanyak 13.912 ton dalam tahun 1962. Dalam pada itu sampai dengan periode pertengahan pertama tahun 1964 Jugoslavia telah mengimpor sebanyak 10.405 ton. Impor karet oleh Jugoslavia dalam tahun 1964 tampaknya tidak lantjar dengan djumlahnjapun masih dibawah kebutuhan pabrik² pengolah karet dimana pada akhir bulan September 1964 sebuah pabrik sepatu & boot „Borovo” yang mempunjai kapasitas besar terpa-

utup pabriknya selama 3 hari karena kehabisan bahan baku (karet). Sedjalan dengan adanya perantara pada sebuah pabrik pengolah karet dan pabriknya bekerdja sebuah pabrik dan lain yang baru yang telah dibangun, maka diharapkan bahwa konsumsi karet oleh Jugoslavia dalam tahun 1965 ini nanti akan naik dengan 2 a 3.000 dan desas-desus telah beredar bahwa dalam tahun 1965 ini akan mengimpor karet alam dari Indonesia sebanyak 17.000 ton. Sampai sekarang ini dalam hal membeli karet alam Jugoslavia selalu mendjatuhkan pilihannya kepada high grade dan hanya $\pm 20\%$ sadja terdiri dari low grade. (RSS IV dan V). Diperkirakan bahwa konsumsi karet low grade di Jugoslavia hanya berjumlah ± 2.500 ton per tahun. Diharapkan bahwa dalam tahun 1965 para konsumen karet di Jugoslavia akan lebih banyak mempergunakan karet high grade daripada ditahun² yang lalu, karena mereka melihat rendahnya ongkos produksi dalam pemakaian karet low grade daripada kalau mempergunakan bahan karet high grade.

Perlu dikemukakan bahwa hingga pertengahan tahun 1964, Jugoslavia djuga masih mengimpor karet alam "high grade Malaja" yakni sebesar 5 ton dalam tahun 1963 dan sebesar 681 ton tahun ini dengan pertengahan pertama tahun 1964.

Negara² supplier karet alam kepada Jugoslavia adalah : Indonesia (terbesar), Malaja, Kambodja, Thailand, Mesir, Inggris dan beberapa negara lain.

Lada :

Dalam tahun 1964 Jugoslavia mengimpor lada dari Indonesia sebanyak 20 ton sadja, meskipun dalam daftar Protocol ditjantumkan angka sebesar 100 ton lada hitam dan 100 ton lada putih, dilihat dari seluruh djumlah impor lada oleh Jugoslavia sebesar 665 ton dalam tahun 1963 dan 215 ton tahun ini masa selama pertengahan pertama tahun 1964 maka impor lada oleh Jugoslavia dari Indonesia adalah ketjil.

Dalam tahun 1964, pembitjaraan² mengenai pembelian lada selalu mengalami kegagalan disebabkan oleh tidak adanya ketjotjokan harga. Negara² supplier lada kepada Jugoslavia ialah : (dalam tahun 1964) : India (579 ton) Malaja (48 ton) Indonesia (8 ton) Jerman Barat (8 ton), Belanda (6 ton), Inggris (3 ton). Perlu ditambahkan bahwa antara Jugoslavia dengan India ada clearing payment agreement atas dasar Rupee.

Kulit :

Hingga tahun 1964 Indonesia belum berhasil mengimpor kulit dari Indonesia masih berdjumlah ketjil yakni 50 ton dan 30 ton masing² untuk masa tahun 1962, 1963 dan 1964. Dalam pada itu daftar dalam Protocol mentjantumkan angka ekspor kulit dari Indonesia ke Jugoslavia sebesar 300 ton kulit tahun ini. Mengingat akan besarnya konsumsi, kulit di

Jugoslavia ekspor kulit dari Indonesia ke Jugoslavia masih mungkin diperbesar.

Dari kontrak yang diadakan dengan para importir kulit di Jugoslavia dapat diutarakan bahwa konsumsi kulit di Jugoslavia terdiri dari kulit kerbau, kulit kambing (kedua-duanya adalah untuk clothing purposes), kulit Ular Piton, dan kulit buaja. Sedangkan kulit lembu sebagian besar sudah dapat ditjukupi didalam negeri.

Djumlah impor kulit oleh Jugoslavia adalah sebesar 20.644 ton, 22.427 ton dan 14.669 ton masing² untuk masa tahun 1962, 1963 dan untuk masa selama pertengahan pertama tahun 1964. Negara² supplier kulit kepada Jugoslavia adalah : (dalam tahun 1963).

C. I. Hides of cattle, raw salted :

Argentina (17.772 ton), Uruguay (1.014), New Zealand (815 ton) USA (837 ton), Tanganjika (408 ton), Italia (262 ton), Finlandia (232 ton), Belanda (188 ton), Norwegia (137 ton), Swedia (138 ton) dsb.

C. II. Hides of cattle, dried.

Argentina (232 ton), India (168 ton), Indonesia (50 ton), Tanganjika (41 ton), Pakistan (31 ton), Uruguay (11 ton), dsb.

d). Kaju :

Hingga tahun 1964 ini Indonesia belum berhasil memasukan kaju kedalam pasaran Jugoslavia meskipun telah diusahakan adanya kontak antara pembeli di Jugoslavia dengan eksportir kaju di Indonesia; djuga dalam daftar Protocol telah ditjantumkan ekspor kaju oleh Indonesia ke Jugoslavia sebanyak 1.000 ton. Kaju dapat dibedakan dalam 2 golongan :

d. 1. Kaju djati :

Selama ini Jugoslavia mengimpor kaju djati dari Thailand, Burma dan Italia. Dari kalangan importir kaju di Jugoslavia merentjanakan untuk mengimpor kaju dari Indonesia. Diperkirakan bahwa dalam tahun 1965 ini Jugoslavia akan mengimpor kaju djati sebanyak ± 3.000 M³. Perlu dikemukakan bahwa di Jugoslavia kaju djati dipergunakan sebagai bahan veneer perabotan rumah tangga serta sebagai bahan konstruksi pada kapal. Selama ini Jugoslavia mengeksport setjara besar² an perabotan rumah tangga (medja, kursi, lemari, buffet dsb.).

d. 2. Kaju hutan/Kaju djenis keras lainnja :

Untuk memenuhi bahan kaju djenis ini, sebagian besar Jugoslavia telah mempergunakan kaju yang didapat didalam negeri; meskipun mutunya lebih rendah daripada apa yang disebut kaju hutan terpis. Meskipun demikian, untuk menutup kebutuhan kaju yang diimpor dalam djumlah relatif ketjil itu, kalangan importir kaju di Jugoslavia kini mulai melala-

(Bersambung ke hal. 38).



Perusahaan
NIAGA NEGARA

P. N. PEMBANGUNAN NIAGA

Kantor Pusat: Hajam Wuruk No. 127 Djakarta

Telepon No. O.K: 21401 - 02 - 03

Melaksanakan Triprogram Pemerintah, dalam bidang perdagangan teknik.

1. Impor/Distributor :

Bahan baku; bahan bangunan; Obat²an pharn¹asi; bahan² kimia tehnik; mesin² kimia tehnik; mesin² perkebunan/pertanian; mesin² industri ringan/berat; mesin² logam/kaju; grafika; alat² besar & Road rollers; mesin² diesel & tenaga penggerak utama arus lemah; arus kuat; mesin² sandang (pemintalan, peradjutan, pertenenan, Finishing & printing).

2. Export/interinsulair :

Karet, kopra, hasil² bumi dan barang²tehnik.

3. Pembangunan projek² :

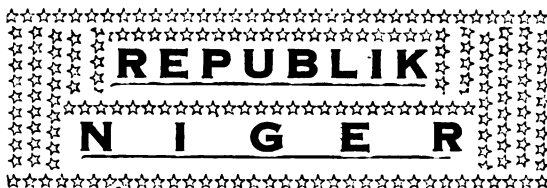
Perentjana & pelaksana; melengkapi; reparasi & revisi, Projek² umum dan industri.

Tjabang² Utama : Djakarta, Bandung, Semarang, Surabaja, dan Medan.

Tjabang² biasa : Palembang, Padang, Banda Atjeh, Makasar dan Manado.

Sub. Tjabang : Tjirebon

Perwakilan di luar Negeri: Tokyo, Amsterdam dan Manila.



RAKJATNJA SEDJAK DAHULU ANTI-NEKOLIM BELUM MENDAPATKAN KEMERDEKAAN SEPENUHNJA

Niger berbatasan dengan Republik Mali, Libia, Aljazair, Chad, Nigeria, Dahomey dan Volta Hulu. Luas wilayahnya seluas 1.267.000 kilometer persegi dan penduduk lebih dari tiga djuta, 5.000 diantaranya adalah orang² Eropa. Suku² bangsanja ialah Hausa, Djerman-Songhai dan Fulbe. Bahasa Perancis adalah bahasa resminja, Niamey adalah ibukotanja yang berpenduduk 30.000 djiwa.

Niger merupakan negara agraris jang masih belum maju dengan penduduknja jang sebagian besar terdiri dari petani, jang bertjotjok tanam setjara berpindah-pindah. Negara ini hanja mempunjai penduduk jang bukan petani sebanjak 18.350 orang. Hasil² pertaniannja tidak pernah memenuhi kebutuhan didalam negeri dan terpaksa mengimpor bahan makanan dari luar.

Kekayaan alamnja tidak tjukup untuk digali. Hanja ada satu pertambangan timah dengan produksi tahunannja 90 ton. Tambang² tembaga, besi dan aluminium djuga telah diketemukan. Kekayaan tenaga listrik tidak dimanfaatkan dan hanja 1.k. 8 djuta kwh tenaga listrik jang dihasilkan tiap tahunnja.

Perindustrian masih muda sekali. Baru mempunjai beberapa pabrik kapas, tiga pabrik minjak tumbuh² dan beberapa pabrik ketjil lainnja. Kebanyakan tenaga para pekerdja disini bekerdja dalam pertambangan djalan, djembatan dan bangunan. Tidak ada djalan kereta api.

Hasil² ekspor dari Niger hanja bernilai lebih sedikit dari 3.100 djuta franc Afrika. Barang² utama jang diekspor ialah katjang tanah dan hasil² jang lain dari katjang tanah. Barang² jang diimpor ialah bahan-bahan utama barang² kebutuhan pokok, jang didatangkan dari Perantjis.

Sistem feodal Perantjis mendominasi perekonomian di sini. Modal ini menguasai semua perusahaan² industri, fasilita² transpor, perbankan dan perdagangan luar negeri. Penanaman modal Perantjis dari tahun 1947 sampai dengan 1961 sampai meliputi 1.000 djuta franc Perantjis baru.

Pemerintah Niger sadar akan perlunya memenangkan kemerdekaan ekonomi karena tanpa itu kedaulatan negara tidak akan sempurna. Untuk ini pemerintah telah mulai membentuk sektor perekonomian baru, telah membentuk pengawasan atas pembelian dan ekspor katjang tanah dan telah menerima

rentjana pembangunan ekonomi tiga tahun, jang mengandjurkan penanaman modal 22.600 djuta franc Afrika. Uang ini dimanfaatkan bagi pembangunan djalan², rumah², sekolah², rumah sakit dan kantor², pembangunan fasilita² tenaga listrik, pertanian, industri dan keradjanan tangan. Rentjana tiga tahun ini akan diikuti oleh rentjana sepuluh tahun.

Anti pendjadjahan.

Rakjat Niger telah bernegara sedjak sebelum datangnya kolonialis Perantjis. Waktu itu sudah ada negara Hausa dan kesultanan² Zinder dan Agades. Daerah sebelah Barat merupakan bagian dari kekaisaran Goa dan kemudian Mali; daerah² sebelah Timur bagian dari Kekaisaran Bornou. Rakjat Lembah Niger telah menundjukkan perlawanannja jang gigih terhadap kekuatan² kolonial Inggris dan Perantjis. Baru pada tahun 1902, Perantjis berhasil mengindjak kakinja dibumi Niamey, tapi masa berikutnya dari pemerintahan Perantjis ditandai oleh pemberontakan² jang berulang² terdjadi.

Tahun 1946 koloni Niger mendjadi „wilayah seberang lautan” dari Republik Perantjis. Apa jang disebut Dewan Teritorial dibentuk, hak memilih terbatas diperkenalkan dan partai² politik serta serekat² sekerdja diberi hak hidup. Ini merupakan kemenangan besar bagi gerakan kemerdekaan nasional di Niger dan bagi kekuatan² demokratis Perantjis. Dalam tahun jang sama terbentuklah Partai Progresif Niger (PPN), tjabang setempat dari African Democratic Rally (RDA).

Awal tahun 1950, ketika pimpinan berkompromi dengan pihak kolonialis, terdjadilah perpjetjahan didalam PPN. Bagian terbesar dari anggotanja jang dipimpin oleh Sekdjennja, D. Bakary, menolak untuk mengikuti djedjak pimpinan itu dan membentuk partai baru, Uni Democratic Niger (UDN), jang telah memenangkan dukungan dari serekat² sekerdja jang progresif. Tahun 1957, UDN mengubah nama-nja mendjadi Partai Sawaba (Kebebasan) dan mendjadi tjabang setempat dari Gerakan Sosialis Afrika dan tahun 1958 mendjadi bagian dari Partai Reuni Afrika.

Dengan adanya hak memilih di „wilayah seberang lautan”, Partai Sawaba memperoleh kemenangan mutlak dalam pemilihan untuk Dewan Wilayah bulan Maret 1957. Ketua Partai, D. Bakary, mendjadi wakil ketua dan tahun 1958 mendjadi Ketua Dewan Pemerintahan Niger.

Musim panas tahun 1958, Partai Sawaba menuntut agar Niger diberi kemerdekaan politik dengan segera dan jangan dijadikan bulan-bulan tindakan sewenang² dari pembesar² kolonial. Meskipun ada usaha² dari kolonialis Perantjis untuk membuat rakjat Niger setuju dengan konstitusi yang dibuat de Gaulle tentang pembentukan Persemakmuran Perantjis, namun hanya 37,4 persen dari pemilih di Niger ikut dalam referendum yang dilangsungkan 28 September 1958 dan hanya 25 persen dari mereka yang menyetujuinya. Meskipun demikian, Niger tetap tidak dimerdekakan.

Perjuangan berdjalan terus.

Tindakan selanjutnya dari pihak kolonialis Perantjis ialah memaksa pemerintahan Bakary mengundurkan diri dan Dewan Wilayah dibubarkan. Pemilihan-pemilihan kemudian diadakan 14 Desember 1958, sementara militer Perantjis memerintah negara itu. 18 Desember Dewan Wilayah yang baru dipilih memproklamkan Republik Niger, yang menjadi anggota Persemakmuran Perantjis. Bulan Oktober 1959 Partai Sawaba dilarang dan banjak pemimpinja termasuk Bakary, dibuang atau dipenjarakan.

Tetapi gerakan bagi kemerdekaan Niger berdjalan terus. Sebagai hasil dari pembijtaraan² antara Niger dan Perantjis, Republik Niger diproklamkan sebagai negara merdeka tanggal 3 Agustus 1960. Tanggal 24 April 1961 Pemerintah Niger dan Perantjis menandatangani persetujuan mengenai „kerdjasama” dibidang politik luar negeri, pertahanan, ekonomi dsb.

Niger diterima sebagai anggota P.B.B., 20 September 1960. Sekarang mempunyai hubungan² diplomatik dengan Perantjis, Amerika Serikat, Inggris, Jerman Barat, Belgia, Ghana, Guinea, Nigeria dan negara² lain. Uni Soviet telah mengakui Republik Niger, tetapi tidak mempunyai hubungan² diplomatik dengan negara itu.

Berdasarkan undang² dasar 8 Nopember 1960, Niger merupakan Republik Presindetil dengan sistim

satu partai. Presiden dari Republik itu adalah kepala Negara dan kepala pemerintahan serta dipilih oleh pemilihan umum untuk masa lima tahun. Presiden mempunyai kekuasaan menundjuk dan mengherkan para menteri, mengeluarkan dekrit, menandatangani perdjandjian², melantik dutabesar² dan dju sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Peran. **Hamani Diori**, yang dipilih sebagai pengetju oleh Dewan Nasional, adalah Presiden Niger sed bulan Nopember 1960.

Dewan Nasional Niger yang merupakan parlem dipilih atas dasar pemilihan umum djuga untuk masa djabat lima tahun, berbarengan masa djabat Presiden. Kekuasaan² legislatifnya terbatas. Pemerintahan tidak bertanggungjawab kepada Parlem tetapi kepada Presiden.

Parlemen Niger dipilih bulan Desember 1959 sebagai Dewan Wilayah, dan tahun 1959, tar pemilihan kembali, dinjatakan sebagai Dewan Legislatif. Tanggal 3 Agustus 1960 badan ini memproklamkan dirinja sebagai Dewan Nasional.

Kegiatan politik.

Setelah pelarangan Partai Sawaba tahun 1959 sistim satu partai diperkenalkan di Niger. Partai Progresif Niger (PPN), bagian RDA (African Democratic Rally), menguasai semua kursi di Parlemen dan semua djabat menteri dalam pemerintahan.

PPN, satu partai nasional bordjuis, mengandjikan untuk tetap memelihara hubungan² yang rapat dengan Perantjis dan „kerdjasama” dengan negara Barat lainja. Sementara mendukung ikut serta Niger didalam Uni Afro-Malagay, negara ini memperkokoh ikatan²nja dengan negara² Afrika Merdeka seperti Ghana, Guinea, Mali dan R.P.A. Sekarang sedang membina hubungan² dagangnja dan kebudajaannya dengan negara² sosialis serta bertekad untuk memenangkan kemerdekaan ekonominya.

(ANTARA SPEKTRUM).

(Sambungan hal 34).

kukan penjelidikan sampai dimana kaju² hutan di Indonesia dapat dipergunakan sebagai bahan veneer atau purpose lainja.

c. Timah :

Impor timah oleh Jugoslavia dari Indonesia dalam tahun 1964 sangat berkurang dibanding dengan tahun 1963 yakni berdjumlah sebesar 100 ton dibanding dengan 1.473 ton. Sebab² dari turunnja impor timah oleh Jugoslavia dari Indonesia jalah berhubung dengan dipindahkannya pengetjoran bidji

timah dari Penang ke Arnhem dinegeri Belanda dari pemindahan mana oleh pihak pembeli di Jugoslavia dirasakan adanya kenaikan harga sebagai akibat dari penambahan pembajaran freight and bidji timah dari Indonesia kenegeri Belanda (kenaikannya berkisar \pm £. 30/-/- per ton).

Lain² commodities :

Pembeli² di Jugoslavia tidak dapat memperoleh hasil² bumi seperti minjak sawit, serat sisal, buah mangan dari eksportir² atau produsen² di Indonesia.

EKSPOR PRODUK NASIONAL BERMUTU

MEMPERTINGGI GENGGI NEGARA

Karena itu mantrust :

- memproduksi Corned Beef merk FORTUNA yang ekspornja telah dilaksanakan.
- membangun pabrik pengawetan nanas ditengah² hutan dekat GESEK (Kep. RIAU) dalam waktu 109 (seratus sembilan) hari realisasi Projek Nanas Kopedasan, untuk produksi dan ekspor nanas merk PARAMOUNT.

mantrust

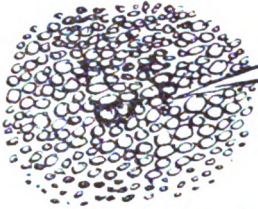
Kantor Pusat : Dj. Halimun 22 Bandung — Tel. 4185-4186-5536

Perwakilan Djakarta : Dj. Raya Djatinegara Barat 124

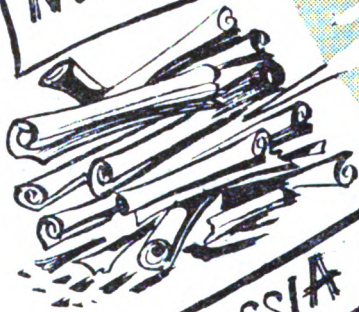
Tel. 81335-81391-81392.



PEPPER



NUTMEGS



CASSIA VERRA



GALEKROOTS

EXPORTED!

to all parts of

the **WORLD**



P_n PANTJA NIAGA

SUDOIMPORT



Smolenskaya-Square, 32/34
MOSCOW, G - 200

EXPORTS :

- * *sea-going and river-craft: passenger, dry cargo, tank, fishing, tugs and small vessels;*
- * *dredgers, suction dredger, earth-carrying scows, pumping stations, floating docks, rescue ships;*
- * *marine main propelling machinery and auxiliaries;*
- * *deck machinery;*
- * *electrical machines, electric units and fixtures (marine version);*
- * *marine radio equipment;*
navigational aids and instruments;

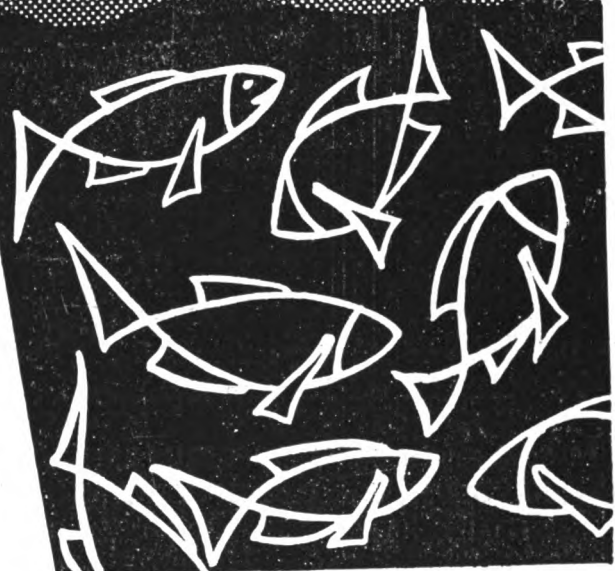
- * *life-saving appliances, diving gear, light-house equipment*



File Address : SUDOIMPORT-
MOSCOW

For inquiries please contact :
THE U.S.S.R. TRADE REPRESENTATION IN INDONESIA,

Djalan Teuku Umar 60,
Tel. 46394 — Djakarta.



P.T. "KARKAM"

(P.T. KULIT ATJEH RAYA KAPTEN MARKAM)

KANTOR PUSAT : Djl. Pintubesar Selatan 97 atas Djakarta-Kota
Tilpon 23368 - 22644 - 21092
alamat kawat : KARKAM DJAKARTA

KANTOR TJABANG : M E D A N
P e k a n b a r u
D u m a i
R e n g a t
D j a m b i

KANTOR PERWAKILAN : T e m b i l a h a n
B e n g k a l i s
P a l e m b a n g
S i b o l g a

PPN P.T. KARKAM : A e r m o l e k (R i a u)

Perusahaan Remilling P.T. KARKAM : Kampung Lalang Sunggal (Sumatra Utara)

EXPORTIR : K A R E T
K O P R A
dan hasil perkebunan lainnja

IMPORTIR : BARANG² KEPERLUAN PEMBANGUNAN
KENDARAAN²
MESIN² DIESEL
untuk berbagai matjam keperluan
MESIN² KAPAL

BANK² KAMI IALAH : BANK INDONESIA
BANK NEGARA INDONESIA
BANK DAGANG NEGARA
BANK KOPERASI TANI & NELAJAN

** Dalam rangka „banting setir” untuk „berdikari” dibidang ekonomi dan pembangunan,
P.T. KARKAM melaksanakan kegiatan²-nja semata-mata untuk membantu Pemerintah.

** Sembojan kami "MADJU TERUS PANTANG MUNDUR" UNTUK KEMENANGAN
REVOLUSI dan UNTUK TERTJAPAINJA MASJARAKAT SOSIALIS INDONESIA.

WARTA



Perdagangan

RECEIVED

NOV 11 1966

UNIV. WIS. LIBRARY

AP
299
2433
18
14



TAHUN KE-XVIII

NOPEMBER 1965.

14

MADJALAH „WARTA PERDAGANGAN”

Terbit tiap 2 Minggu sekali

Diterbitkan oleh :

Departemen Perdagangan Dalam Negeri beserta Urusan Perdagangan Luar Negeri dari Kompartimen Luar Negeri/H.E.L.N. dan Perdagangan Luar Negeri.

Pelindung :

J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/
Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri
BRIG. DJENDERAL A. JUSUF

Pemimpin Umum :

Kepala Direktorat Marketing dan Research
Ir. J.J. Pitoy M.A.

Staf Redaksi :

Staf Direktorat Marketing dan Research.

Penanggung Jawab :

Kepala Seksi Publikasi Madjalah
Anwar B. Harahap.

Pembantu, Tetap :

Prof. Ir. Teko Sumodiwirja — Kolonel Jusuf
Ramli — R. Hertatyanto S.H. — Drs. Waskito
— Dr. J. Panglaykim.

Pembantu Khusus :

Kolonel Usman Ismail — Alamsjah S.B.P. —
R.H. Tuwaidan M.A. — Drs Sjaaf Muchtar —
Major Drs Sukadjat — R. Isa — Budhiman
B.A. — Drs A. Aidit — Suprpto — Sudjadi
— A. Karim Usman S.H.

Alamat Redaksi dan Tata Usaha :

Madjalah "WARTA PERDAGANGAN"
Direktorat Marketing dan Research
Djl. Tanah Abang Timur No. 87,
D J A K A R T A.

Pelaksana/Pertjetakan :

Kepala Pertjetakan P.N. Karya Tjotas
Burdi Reksodirdjo.

Pembayaran uang langganan dilakukan dimuka dengan :

1. Penjetoran atas Rekening Madjalah Warta Perdagangan Kode No. KB/WA/-194, pada Bank Negara Indonesia Unit I Djl. Thamrin, Djakarta.
2. Dinas Giro dan Tjek Pos atau dengan pos wesel jang langsung dialamatkan kepada Tata Usaha Warta Perdagangan Direktorat Marketing dan Research.

Daftar Isi :

	Halaman
1. Presiden Sukarno : Agar kita tidak kehilangan akal dan kepala	11
2. Binalah Kesatuan dan Persatuan Nasional Progresif Revolusioner Atas Dasar Pantja Azimat Revolusi	3
3. Petualangan Kontra Revolusi "G-30-S mengganggu keamanan Revolusi (Dr. H. Roeslan Abdulgani)	11
4. Instruksi Presidium Kabinet Dwikora R.I	14
5. Seruan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri	16
6. Beberapa masalah dalam bidang Marketing ternak potong	18
7. Prosedur pelaksanaan pemakaian Kredit atas dasar Production Sharing untuk marketable goods (Consumer goods)	23
8. Varia berita singkat Ekonomi perdagangan Dalam Negeri	25
9. Pengumuman Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri	27
10. Adjaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno "Djerit Kegemparan"	30
11. Angka statistik	33
12. Ilarga Penjerahan Karet dari Mainports Indonesia	37
13. Harga Penjerahan Barang Ekspor Gol. II	38

Keterangan gambar kulit muka :

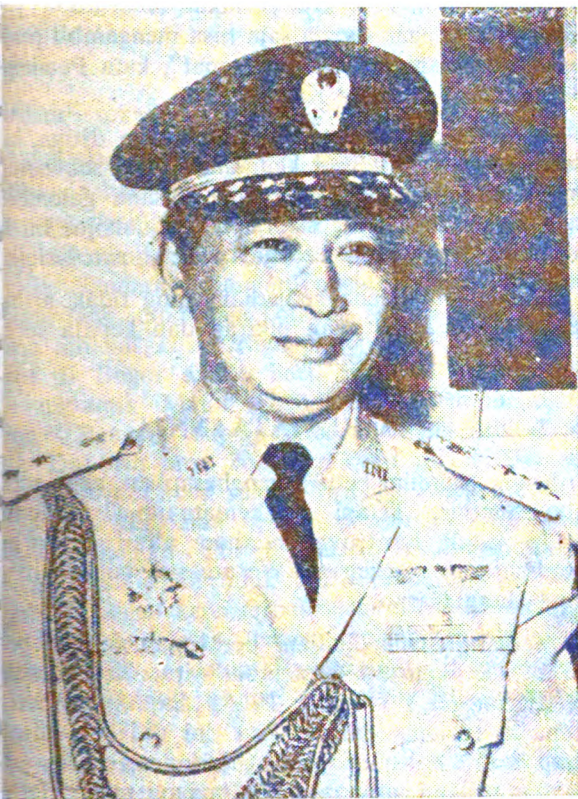
Tikar rumput suatu hasil industry rakjat jang banjak terdapat disekitar Tasikmalaja.

IZIN TERBIT :

Keputusan Menpen No. 00231/R/SK/DPH/SIT/'65 tgl. 3-9-1965, dan

Keputusan Peperda Djakarta Raya dan Sekitar No. Kep. 037/P/X/65, No. Urt. 5 tgl. 21-10-1965

Agar kita tidak kehilangan akal dan kepala



1. Menteri Pangad Major Djendral Soeharto

Presiden Sukarno/Panglima Tertinggi ABRI am amanatnja ketika melantik Major Djenderal arto selaku Menteri/Pangad jang baru, jang ngsungkan di Istana Negara Sabtu pagi, tanggal Oktober 1965 berseru kepada seluruh rakjat onesia agar tetap waspada dan djangan sampai bukau dalam mendjalankan tugas revolusi, hanja i karena terdjadinja peristiwa² jang dilakukan i petualang apa jang menamakan dirinja „Gera- 30 September”.

alam mengatasi akibat² jang ditimbulkan oleh rakan 30 September” itu, hendaknja kita semua o memelihara ketertiban dan ketenangan jang lik²nja. Djanganlah kita kehilangan akal. anlah kita sampai kehilangan kepala dan akal t kita, malahan sebaliknja kita harus memper- gi kewaspadaan dan konsentrasi seluruh pikiran tenaga kita sebaik²nja, agar supaja revolusi kita

jang maha-dahsjat ini tetap berdjalan menudju tjita² jang telah kita rumuskan bersama. Kita harus me- melihara kewaspadaan kita, agar revolusi kita djangan sampai rusak atau kurang lantjar djalannja, kata Bung Karno.

MEMANG SATU KEDJADIAN JANG TIDAK NJAMAN.

Ditegaskan oleh Presiden, bahwa peristiwa jang diakibatkan oleh apa jang menamakan dirinja ”Gerakan 30 September” itu memang merupakan salah satu kedjadian jang tidak njaman dalam revolusi kita. Memang telah terdjadi kedjadian², jaitu kedjadian² dalam Angkatan Darat, dalam Tja- krabirawa, dalam Angkatan Udara dan dalam kehi- dupan politik kita pada umumnja.

„Tapi marilah kita bersama² mengatasi segala kedjadian jang tidak njaman itu dengan tidak sam- pai kehilangan kita punja akal, kita punja kepala, agar supaja revolusi kita tetap berdjalan diatas rel- nja menudju tjita² revolusi kita jang maha-hebat itu”, kata Bung Karno.

Dikemukakan selandjutnja, bahwa pihak Nekolim sangat berdjingkrak-djingkrakan, tatkala mendengar terdjadinja peristiwa „Gerakan 30 September” itu. Mereka itu tampak sekali sungguh² senang dan ber- tepuktangan, oleh karena mereka mengira kita akan hantjur atau runtuh dengan terdjadinja petualangan „Gerakan 30 September” itu.

Kegembiraan kaum Nekolim itu memang sudah sewadjarnja, karena bukanlah Nekolim namanja, kalau tidak senang dan djingkrak²an melihat dan mendengar kedjadian jang tidak njaman bagi revolusi kita itu.

DJANGAN KIRA R.I. LUPA.

Diperingatkan oleh Kepala Negara, bahwa kaum Nekolim adalah musuh kita jang besar dan oleh karena itu kita djanganlah sampai terpukau oleh kedjadian² jang terdjadi ditanah air kita achir² ini, sehingga kita melupakan tugas revolusi kita untuk menghantjur-leburkan kaum Nekolim dan negara boneka ”Malaysia”.

Sebagai tanggapan atas djingkrak²an kaum Neko- lim itu, Bung Karno berkata „Hei, Nekolim djangan kira R.I. dan rakjat Indonesia akan djadi lemah dan

akan melupakan untuk mengganjang Nekolim dan menghanturkan negara boneka Malaysia, hanya karena dinegara Indonesia terdjadi peristiwa apa jang menamakan dirinja „Gerakan 30 September” itu.

Ditekankan oleh Bung Karno, bahwa rakjat Indonesia sedetikpun tidak akan pernah lupa, bahwa musuhnja jang utama ialah kaum Nekolim. „Djanganlah engkau kira, hei Nekolim bahwa rakjat Indonesia akan djadi lunak dalam perdjuaan menghanturkan Nekolim dan melaksanakan Dwikora. Konfrontasi terhadap negara boneka „Malaysia” terus dilaksanakan”.

KUNTJI HARI KEMUDIAN.

Dikemukakan pula, bahwa peristiwa „Gerakan 30 September” itu malahan akan membuat rakjat Indonesia lebih menjempurnakan segala kekuatan, agar dalam menghadapi Nekolim kekuatan R.I. lebih heibat dan lebih kompak lagi.

Menurut Presiden, dengan diangkatnja Major-Djenderal Suharto sebagai Men./Pangad jang baru, maka „sekarang saja sedang menjempurnakan Angkatan Darat, membuat AD lebih baik, lebih kompak untuk menghantam musuh² kita”.

Kepala Negara mengadjak seluruh rakjat Indonesia untuk bersama² berusaha menjempurnakan ABRI kita, agar perdjuaan lebih ulet lagi dari jang sudah². Ingatlah bahwa kita semua kini sedang berhadapan setjara langsung dengan Nekolim.

Ditandakan, bahwa hantjurnja Nekolim adalah kuntji hari kemudian kita. Revolusi Indonesia jang maha dahsjat ini hanya akan berhasil, bila kita semua sepenuh hati mendjalankan pantja azimat revolusi. „Saja perintahkan kepada Major-Djenderal Suharto: Sekarang pimpinlah Angkatan Darat. Buatlah AD mendjadi angkatan bersendjata jang benar² mendjalankan Pantja Azimat Revolusi. Ingatlah akan Manipol sebagai haluan negara kita. Manipol telah ditetapkan oleh Lembaga Tertinggi kita sebagai haluan R.I. dan karena itu harus kita djundjung tinggi dan dipupuk terus oleh kita semua, oleh semua lapisan, termasuk ABRI”, demikian Presiden Sukarno.

Dikatakan, bahwa hanya bila kita semua benar² berdiri diatas landasan Pantja Azimat Revolusi, maka barulah revolusi kita bisa mendjadi djaja dan betul² akan terlaksana dengan heibat dan sempurna.

Kalau perdjuaan kita tidak kita landaskan betul² pada Pantja Azimat itu, maka revolusi kita akan gagal. Ingatlah bahwa kita semua ini untuk revolusi, untuk mensukseskan pelaksanaan revolusi.

TIDAK MAU FAKTA² JANG TERSELIMUT.

Berkali² Kepala Negara memperingatkan, agar kita tidak kehilangan akal dan kehilangan kepala menghadapi setiap kedjadian jang tidak njaman.

„Saja telah berkali² berseru, agar kita semua memelihara ketertiban dan ketenangan tanah air kita dan djanganlah emosi² dan sentimen² membakar kita semua dari kiri dan dari kanan”.

Emosi² dan sentimen² jang dibakar² terus tidak akan dapat menjelesaikan sesuatu persoalan dengan tepat, dalam hal ini untuk mentjari penjelesaian dibidang politik berkenaan terdjadinja peristiwa apa jang dinamakan „Gerakan 30 September” itu.

„Hanya dalam suasana tenang dan tertib saja bisa melihat dan menemukan fakta² jang lengkap dan fakta² jang penuh. Saja tidak mau melihat fakta² jang terselimut. Jang saja perlukan ialah fakta² jang sepenuh²nja, agar supaja saja bisa mengambil penjelesaian dibidang politik jang tepat”, kata Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

Dalam keadaan jang bagaimanapun djuga, kita harus tetap mengetahui kedjadian² jang sebenarnya, agar supaja revolusi kita jang laksana gelombang jang maha-dahsjat itu mentjapai tudjuannja. Ini kewajiban kita semua sebagai putera² revolusi.

Djanganlah karena kedjadian² jang tidak njaman itu lalu kita kehilangan pikiran dan kepala seperjam² jang tanpa kepala.

APA KENJATAANNJA.

Kaum Nekolim betul² mengharapkan, agar supaja kita hantjur. Tetapi apa kenjataannja? Indonesia tetap tidak hantjur, malahan akan terus bertambah kuat dan tegap. „We are still going strong” kata Bung Karno.

Memang ada kedjadian² berkenaan dengan peristiwa „Gerakan 30 September” itu. Tetapi sedjapa² tanggal 1 Oktober 1965, „Saja telah berka² kepada rekan², bahwa kita ini didalam revolusi jang maha dahsjat, revolusi Indonesia jang selalu saja tampilkan laksana samudra jang maha dahsjat jang bergelombang dan bergelora”. Djuga sebagai satu sungai jang maha-besar, terus mengalir kearah laut dan dalam mengalir kelaut itu, makin lam makin besar dan dahsjat.

Tiap² revolusi jang besar adalah sematjam sungai jang maha dahsjat, jang selalu mengalami pasang-surut. Tetapi jang penting bagi kita dalam mengatasi pasang-surut itu, kita tidak boleh kehilangan akal.

Bung Karno dalam awal amanatnja, ketika melantik dan mengambil sumpah menurut agama Islam kepada Major-Djenderal Suharto selaku Men./Pangad jang baru dengan nada penuh memaklumkan membuka kedok Nekolim beserta pers dan anteknja jang bergembiraria tatkala mendengar kedjadian jang tidak njaman terdjadi di Indonesia.

Biarlah kaum Nekolim itu melantjarkan kakor, karena itu memang sudah watak mereka, kata Bung Karno.

Binalah Kesatuan dan Persatuan Nasional Progresif Revolusioner Atas Dasar Pantja Azimat Revolusi

Amanat Presiden Sukarno pada sidang Pantja
Tunggal Seluruh Indonesia di Istana „Negara”,
Djakarta, pada tanggal 23 Oktober 1965.

audara² sekalian,

Lebih dulu saja tanja, saudara² semua dalam
adaan sehat wal afiat apa tidak? Semua? Tidak
a jang pusing kepala?

Sjukur alhamdulillah, memang saja hendak minta
pada Saudara² djangan pusing kepala, djangan
bagai jang sudah saja katakan beberapa kali, baik
lam amanat saja terhadap kepada Kabinet Pari-
rna di Bogor tempo hari, maupun pada waktu
ja melantik Major Djenderal Suharto mendjadi
enteri/Pangad, supaja kita djangan kehilangar
al. Dat wij onze kop niet kwijt raken. Dat wij
ze kluts niet kwijt raken. Tenang, dapat meletak-
n segala persoalan kepada proporties jang sebe-
rnja. Djangan kita terlalu, bahkan bagi kamu
ang, sama sekali tidak boleh dikuasai oleh sen-
nen². Djangan kena terbakar, terbakar dalam rasa
n firiranmu. Tetapi tenang, tenang, tenang meng-
dapi kedjadian dalam Revolusi kita, sebagai jang
lah kita kenal, sebagai kedjadian 30 September
ng lalu.

Baik dalam amanat saja dalam Kabinet Pari-
rna, maupun dalam wawantjara² saja dengan
rtawan² asing. Misalnja 4 hari jang lalu saja ber-
dapan dengan wartawan² asing dari Djepang 14
ng djumlahnja. Saudara² mengerti bahwa kedja-
un di Indonesia sedjak 30 September itu menarik
tul perhatian daripada dunia luaran. Dunia luaran
a jang melihat kedjadian² dan akibat² daripada
djadian² itu, setjara objectief, sebagian besar de-
an tjara wishful thinking, sebagian besar bahkan
ngan mentjoba dengan sengadja mempengaruhi
m firiran kita.

Nah, didalam amanat saja terhadap kepada
binet Paripurna, dalam wawantjara² saja kepada
rtawan² asing, dalam pidato amanat saja tatkala
a melantik Djenderal Major Suharto mendjadi
nteri/Panglima Angkatan Darat, saja tegaskan
rwa kedjadian 30 September cs. kedjadian 30
ntember cs. met alles wat er mee samengaat, —
alles wat er mee samengaat itu ada jang menda-
ui, ada jang pada saatnja, ada jang komt er na;
loognja, faktanja 30 September, kemudian de-
leep—, bahwa itu semua adalah boleh dikatakan

satu hal jang biasa, jang normal didalam sesuatu
revolusi. Dan kita jang harus, bukan sadja menjem-
buhkan revolusi ini daripada semua penjakit²nja, —
Saudara saja minta tangkap perkataan saja, penja-
kit—, jaitu berarti bahwa saja tidak benarkan kedja-
dian 30 September ini.

Itu berarti bahwa saja anggap 30 September itu
adalah satu kedjadian penjakit. Tetapi Saudara²,
didalam amanat² saja, saja berkata, segala itu sebe-
narnja adalah, — segala itu jang mengenai 30
September, mengenai jang lain², — adalah satu hal
jang didjumpai dalam tiap² revolusi.

Tiap² revolusi, djikalau revolusi itu benar²
revolusi. Bukan djikalau revolusi itu sekedar satu
palace revolution, bukan djikalau revolusi itu sekedar
satu putsch, tidak. Djikalau revolusi itu benar²
revolusi, revolutie ini de volkomen zin van het
woord, maka kedjadian² demikian itu sebetulnja,
sebagai kukatakan dalam amanat saja pada waktu
saja melantik Djenderal Major Suharto, sekedar satu
gontjangan air dalam samudra, atau satu gontjangan
air dalam sungai besar jang maha dahsjat turun dari
gunung kesamudra raja. Saja pernah memakai per-
kataan rimpel.

Rimpel inde ocean van de revolutie. Rimpel dalam
ocean itu bukan rimpel seketjil ini, tidak. Rimpel
dalam ocean ialah oh kadang² lebih besar dari pada
istana ini. Tetapi vergeleken met de ocean, maka
gontjangan itu sebetulnja adalah sekedar satu rimpel.

Nah, Revolusi kita adalah revolusi jang benar²
revolusi, saudara². Revolusi jang sudah sering saja
gambaran dengan matjam² perkataan. Ada saja
memakai perkataan Revolusi Pantjamuka. Pernah
saja katakan Revolusi Aneka-muka. Ada pernah saja
katakan Revolusi jang terbesar dari sedjarah ma-
nusia, etc. etc.

Kedjadian 30 September dengan proloognja, de-
ngan faktanja, dengan naloojnja, adalah satu abnor-
maliteit atau satu normaliteit didalam satu revolusi
jang benar² revolusi.

Saja pernah didalam salah satu wawantjara de-
ngan wartawan² asing mentjeritakan revolusi Peran-
tjis. Revolusi Perantjis itu benar² revolusi. Karena
merobah sama sckali het politieke denken van die

tijd. Dulu sebelum revolusi Perantjis, maka politiek denken ialah, feodalistis. Radja jang menentukan segala hal, ala feodal. Malah Lodewijk XIV, le roi soleil, dia menjebutkan diri. Soleil artinja matahari. Aku adalah radja matahari. Aku adalah roi soleil. Aku adalah maharadja diradja, matahari.

Sebagaimana djuga dulu orang Djepang djuga mempunjai maharatu matahari, Amaterasu Omikami. Itu feodal, Saudara². Amaterasu Omikami. Ja, Saudara² dulu jang duduk dalam Peta, atau dalam Kyogun, tahu betul itu apa Amaterasu Omikami. Maka tiap² historikus mengetahui, mengerti bahwa revolusi Perantjis itu adalah sebenarnja satu revolusi jang benar² revolusi. Oleh karena merobah, membongkar het politicke denken van die tijd, merobah sama sekali dari faham feodalisme mendjadi faham apa jang dinamakan parlementaire democratie. Revolusi Perantjis jang melahirkan demokrasi parlementer, demokrasi liberal. Dan revolusi Perantjis ini bukan terdjadi satu dua tahun, sebagai sering kukatakan. Dari tahun 1789, baru 1848, boleh dikatakan tertjapai tudjuan dari pada revolusi Perantjis ini, 11 plus 48 = 59 tahun, djalannja revolusi Perantjis jang betul² revolusi. Belum saja bitjarakan proloog daripada revolusi Perantjis ini. Kalau saja bitjarakan proloog daripada revolusi Perantjis, wah lantassaja harus sebut pemikir² jang mendahului revolusi, Perantjis itu.

Menjebut Voltaire, menjebut Jean Jacques Rousseau, menjebut Montesquieu. Kalau dihitung zamannja Rousseau, zamannja Voltaire, zamannja Montesquieu, revolusi Perantjis ini makan waktu, boleh dikatakan 100 tahun. Tetapi jang sekarang saja tania kepadamu, apakah kamu melihat revolusi Perantjis ini sebagai satu aliran tenang, smooth, litjin? Tidak! Revolusi Perantjis ini terdjadi dengan gontjangan² jang maha dahsjat. Zamannja Mirabeau. Tatkala Mirabeau ditahun 1789 di Kaatsbaan, de eed op de Kaatsbaan, pertama kali menentang radja. Dan pada hari itu Mirabeau dengan kawan²nja berkumpul di Kaatsbaan. Dan radja, Lodewijk XVI mengetahui bahwa Mirabeau ini is going to do something. Lantass radja mengutus orang ke Kaatsbaan, memerintahkan kepada Mirabeau supaya bubar, tinggalkan Kaatsbaan, tidak boleh kumpul disini. Pertama didalam sedjarah Perantjis ada orang berkata, jaitu Mirabeau sendiri berkata kepada utusan radja ini, kembalilah, dan katakanlah kepada orang jang menjuruh engkau, radja, bahwa kami tidak akan meninggalkan tempat ini, ketjuali dengan kekuasaan bajonet. Jaitu, mentjetuskan revolusi Perantjis. Kami tidak mau keluar dari sini, ketjuali diusir dengan kekuasaan bajonet.

Utusan pergi keistana, kasih tahu sama radja Lodewijk XVI. Radja Lodewijk XVI tidak berani berbuat apa². Dan dengan demikian revolusi Perantjis berdjalan.

Tapi, nah Saudara² lihat, apa jang terdjadi sesudah Mirabeau, apakah terus litjin? Oh tidak, tidak. Zamannja Robespierre, gontjangan². Zamannja Danton, gontjangan². Danton sendiri dipenggal

kepalanja op de guillotine. Zamannja Marat, demikian pula. Dia sedang mandi in zijn badkuip, ditikani mati oleh seorang wanita tjantik, dari golongan lain. Dan si-wanita tjantik inipun kemudian dipenggal kepalanja di guillotine. Charlotte Corday. Ingat Saudara², jang dulu pernah sekolah menengah Charlotte Corday jang menikam Marat didalam ia punja badkuip. Zamannja Camille des Moulains, jang djuga dipenggal kepalanja. Kalau Saudara datang ke Paris sekarang ini, rakjat Paris dengan bangga menpertundjukkan kepada Saudara², disini kami dipenggal Maria Antoinette, Place de la Concorde. Disini dulu kami penggal kepalanja Lodewijk XV, etc., etc., etc.; sampai masuk zaman Napoleon, djuga begitu. Sampai akhirnya 1848, baru resmi feodalisme diganti dengan sistem parlementaire democratie atau demokrasi liberal. Satu tjontoh revolusi jang benar² revolusi, Saudara².

Demikian pula revolusi Rus. Tjoba, telah revolusi Rus itu. Jang dimulai tahun 1905, boleh dikatakan. Dengan gerakan jang buat pertama kali menentang kepada feodalisme, kekuasaan Tsar. Sampai keakhir tahun jang achir² ini berdjalan tidak smooth, tetapi selalu dengan gontjangan². Zamannja Kerenski diikuti dengan zaman Lenin, penuh dengan gontjangan². Lenin diikuti dengan zaman Stalin, penuh dengan gontjangan². Zaman Stalin diikuti zaman Malenkov, penuh dengan gontjangan². Zamannja Zinokiev, penuh dengan gontjangan². Zamannja Beria, penuh dengan gontjangan². Zamannja Kaganovitz, penuh dengan gontjangan². Kaganovitz itu sampai sekarang kita tidak tahu mana dia punja djenazah itu, hilang sama sekali. Zamannja Krushchov, gontjangan². Sampai dia sendiri gugur daripada ia punja singgasana.

Satu tjontoh lagi, bahwa revolusi selalu berdjalan demikian. Revolusi kita, Saudara², apa jang kita tidak alami didalam Revolusi kita itu! Tjoba, apa jang kita tidak alami. Kita mengalami PRRI, kita mengalami Permesta. PRRI jang mulai dengan tatkala Kolonel Simbolon dengan kawan-kawannya bersumpah satu sama lain, minum anggur, bersumpah, kita akan mulai. Sudah minum anggur dia banting gelas dari pada anggur itu. Ja, het hoort er bij. Kalau membuat sumpah lantass kemudian, banting. Kita alami hal itu, dengan terus mendjadi PRRI. Kita mengalami Permesta, kita mengalami RMS, kita mengalami Darul Islam, kita mengalami Kahar Muzakar, kita mengalami Batalion 426. Kawan² dari Djawa Tengah barangkali masih fris-jullie geheugen, Batalion 426! Kita mengalami semangatjam. Tetapi sjukur alhamdulillah kita selalu revolucie, qua revolucie bisa mengatasi hal ini. Kita atasi PRRI-Permesta. Kita atasi 426. Kita atasi RMS. Kita atasi 3 Djuli, tatkala saja sendiri berdjalan dikatakan pada waktu itu terantjam dijawaku. Kita atasi 17 Oktober, tatkala saja sendiri disini, di Istana Merdeka, dimuka Istana Merdeka terantjam punja djiwa. Tatkala goed deteld, mulut 11 merantiamkan kepada saja, goed geteld! Sebab berdiri ditangga Istana Merdeka pada waktu

saja hitung, mulut 11 meriam diatjungkan kepada
saja. Kita mengalami Kartosuwirjo. Kita mengalami
ahar Muzakar. Kita mengalami segala matjam.
etapi sjukur, sjukur, sjukur alhamdulillah, kita bisa
mengatasinja. Oleh karena kita bisa memasukkan
kedjadian² itu didalam proporties revolutive. Dalam
proporties-nja revolutive.

Maka oleh karena itu, Saudara-saudara, saja se-
dah terdjadi 30 September, saja sebagai Pemimpin
esar Revolusi, pertama, saja melihat didalam ke-
adian 30 September itu bukan sekadar issue Ang-
katan Darat. Dan saja menghendaki agar supaya
udara semuanja beladjar mengerti, 30 September
akan sekadar issue Angkatan Darat. Entah Ang-
katan Darat jang di Tjakrabirawa-kah, entah Ang-
katan Darat jang duduk di Bataljon 454-kah, entah
angkatan Darat jang duduk dalam Bataljon 530-kah,
entah Angkatan Darat jang berupa Djendral² jang
tubunuh. Djangan sempit didalam saudara² punja
nglihatan. Ini bukan sekadar issue Angkatan
darat, bukan pula issue Angkatan Udara. Dan saja
ta tegas, oknum dari Angkatan Udara ada, oknum
ri Angkatan Darat ada, oknum daripada Tjakra-
rawa ada, oknum dari pada golongan² lain ada.
tapi als geheel genomen, ini adalah satu issue
volusi. Dan kita semuanja, Saudara², harus men-
ga djangan sampai Revolusi kita ini mendjadi
nah atau gugur. Apalagi bagi saja. Sajalah jang
h MPRS ditundjuk mendjadi Pemimpin Besar
volusi. Sajalah jang ditaruh diatas putjuk pim-
an Revolusi ini. Sajalah jang akan dimintai per-
nggungan djawab oleh rakjat, kalau revolusi ini
ak berdjalan baik. Apalagi buat saja. Saja harus
ngerti benar², bahwa 30 September cs., cum suis,
t pro dan naloognja adalah satu issue revolusi.
n saja harus memetjahkan segala persoalan² jang
ngenai issue ini. Oleh karena itu saja
nggil Saudara² Pembantu² saja didaerah, jaitu
udara² dari Pantja Tunggal pada ini hari berkum-
l disini untuk Saudara² lebih dahulu mengerti saja
nja alam fikiran, garisnja alam fikiran saja, the
outlines of my thinking. Dan kemudian untuk me-
lima perintah² dari saja jang Saudara² harus
sanakan, kerdjakan.

Tatkala baru sadja mulai kedjadian 30 September,
u permulaan bulan Oktober ini, saja sudah de-
in segera memerintahkan agar supaya kita djaga
enangan. Tenanglah, tenanglah, tenanglah. Malah
pada semua Menteri saja berkata, ben je bedonderd
je je kop verliest. Ja, saja memakai perkataan
waktu itu, ben je bedonderd dat je je kop verliest.
udje kop bij mekaar, kataka! Houdje kluts bij
kaar! Djangan kehilangan akal! Ajo! terug naar
e post! Ja, itu perintah saja kepada semua
nteri². Dan saja berkata djuga, ben je bedonderd
ik mijn Kabinet ga demisioneren! Tidak! Saja
k akan mendemisionerkan Kabinet saja sekarang
Ketjuali djikalau saja sendiri menganggap perlu
akan perobahan². Tetapi jullie Menteri semua-
kembali, bekerdja op jullie post! Verliest jullie
niet, verliest jullie kluts niet! Kepadamu djuga

semua anggota dari Pantja Tunggal, dari manapun,
op jullie post! Verliest jullie kluts niet, verliest
jullie kop niet! Kerdjakan apa jang saja perintahkan
kepadamu, jaitu hadapi persoalan² ini dengan
tenang, tenang. Bahkan kamu orang harus mem-
bantu mengerdjakan, melaksanakan ketenangan ini.

Saja itu kadang², Saudara², dan sjukur alham-
dulillah, tidak terutama sekali didaerah, di Djakarta
ini, waduh, saja dapat pernjjataan „Taat kepada
Bung Karno, taat kepada Presiden, taat kepada
Panglima Tertinggi, taat kepada Pemimpin Besar
Revolusi, taat mendjalankan segala komando”.
Tapi kadang² diwaktu jang achir² ini, saja mendapat
perasaan, itu tjuma utjapan mulut sadja. Bukan dari
semua dari beberapa oknum. Utjapan mulut katanja
taat, tetapi didalam perbuatannja, saja merasa, oleh
mereka itu dikentutin sama sekali! Mereka tidak
kerdjakan apa jang saja perintahkan. Dan tegas saja
punja perintah ialah, djangan bakar², djangan kobar-
kobarkan sentimen. Sebab, tidak bisa kita memetjaha-
kan persoalan ini, persoalan revolusi ini, djikalau
kita terbakar oleh sentimen. Bukan sadja dalam
negeri, tetapi djuga luar negeri. Saja terus terang,
pada satu hari ik heb er uit gedonderd seorang jang
memimpin surat kabar ini, er uit! Oleh karena dia
membakar terus. Dan membakar setjara kampung.
Saudara². Kemarinpun sudah marah² lagi. Saja me-
rasa marah, salah satu surat kabar mengatakan,
misalnja, bahwa Bapak Djuanda matinja oleh karena
minum minuman dari RRT! Ja apa tidak, ada surat
kabar jang menulis begitu! Tjoba, ini saja mengerti,
saja tahu, maksudnja ini ialah, menghasut kita agar
supaja tjuriga kepada RRT. Tadi pagipun terus
terang sadja, saja marah kepada beberapa Menteri,
kamu dokter, kamu dokter, kamu dokter, kamu tahu,
Djuanda itu matinja apa? : Didalam surat kabar di-
katakan, bahwa Djuanda diratjun, boleh dikatakan,
oleh pihak Tionghoa! Djangan diam sadja! Musti-
nja bantah! Katakan, neen, Djuanda mati serangan
djantung. Tapi ini sengadja, Saudara², dari pihak
surat kabar ini membangunkan suasana bentji kepada
RRT, bentji kepada Tionghoa. Apa akibatnja nanti?
Rasialisme berkobar-kobar disini. Dan sudah ter-
djadi beberapa kedjadian rasialisme itu, jang
rasialisme bukan sadja bertentangan dengan prinsip
kita, tetapi sudah sama sekali membikin djelek nama
kita diluar negeri!

Kita selalu menuduh kepada „Malaysia”, bahwa
„Malaysia” itu didasarkan atas rasialisme. Ja, saja
tempo hari kan berkata, bahwa saja telah bertjakap
dengan Tengku Abdulrachman Putra, kenapa engkau
mengadakan „Malaysia”? Dia berkata, ja, Chinese,
Chinese majority, Chinese, Chinese, Chinese. We
want to overvot the Chinese. Seketika itu saja ber-
kata, salah! Tidak ada satu negara jang bisa berdiri
kuat, djikalau didirikan atas rasialisme. Kitapun anti
kepada rasialisme di Afrika Selatan. Eh, kiranja kita
sendiri bodoh membakar-bakar rasialisme.

Tjoba, tjoba, tjoba, Saudara², saja jang verant-
woordelijk terhadap, djalannja Revolusi, apa tidak
pantas saja marah! Ja, saja betul² marah kepada

Pembantu² saja. Jullie, djalankan perintahku ! Sebab het om de revolutie ! Het gaat niet om mij ! Het gaat niet om generaals ! Het gaat niet om ratusan anggota daripada Pemuda Rakjat jang dibunuh ! Het gaat niet daaron ! Het gaat om de revolutie ! Revolusi harus berdjalan terus ! Sebab, hanja djikalau Revolusi kita berdjalan terus, negara kita bisa selamat, tudjuan kita bisa tertjapai.

Ini masih terus sadja, Saudara², bakar, bakar, bakar semangat, bakar semangat dengan segala, segala matjam djalan. Saja tadi tjuma menjebutkan satu tjontoh, satu tjontoh.

Ada lagi, masih ada lain tjontoh. Satu kabar jang sudah beberapa kali termuat disurat kabar. Oh itu diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Sampai saja pernah, goed geteld, melihat satu foto disurat-surat kabar itu 8 kali termuat ! Acht zegge en schrijve, acht keer. Buat apa? Sampai, lho terus terang lho, terus terang, dari kalangan rakjat sekarang ini sudah mulai timbul rasa muak, rasa muak ! Dikira kami itu tidak mempunyai mata, tidak mempunyai telinga, tidak mempunyai fikiran, kok ditjekoki sampai 8 kali. Dan altijd weer hetzelfde, altijd weer hetzelfde, altijd weer hetzelfde. Apa dikira kami itu bodoh ! Tjoba, batja surat-surat kabar jang sekarang terbit itu. Adakah surat-surat kabar ini memberi pengertian kita tentang kedjadian² didunia? 10% barangkali. 90% tjuma tentang kedjadian² disini sadja. Ajo, saja tanja, benar apa tidak? Kalau saja berkata, 90% daripada newsgiving sekarang ini hanja mengenai iniii sadja, iniii sadja ! Mustinja, Saudara², persurat-kabaran itu djuga memberi kita newsgiving sini dan newsgiving tentang kedjadian² kita didunia. Issues revolusi kita didunia. Tapi sama sekali tidak. Belum pernah saja mengalami satu waktu jang boleh dikatakan perdjjoangan kita terhadap kepada Nekolim begitu vergeten seperti sekarang ini. Ja, ada orang jang ingat perdjjoangan kita kepada Nekolim.

Tetapi jah, kruimeltjes, Saudara². Bandingkan keadaan sekarang ini dengan keadaan pada waktu saja mengadjak minta sukarelawan untuk konfrontasi. Jang pada waktu itu dengan spontan 21 djuta pemuda dan pemudi menjatakan dirinja ingin mendjadi sukarelawan dan sukarelawati. Sekarang mana suasana jang demikian itu, Saudara²? Mana suasana jang demikian itu?

Sekarang itu suasana tjuma, hm, de Chinezen zijn onbetrou bare kerels ! Telah meratjun Djuanda. RRT tidak menaikkan bendera. Lupa bahwa kita itu didalam Trikora dan didalam Dwikora ini mendapat bantuan djuga besar dari RRT. Lupa kita punja Dwikora. Tetapi kita terlalu terpukau dengan sentimen². Maka oleh karena itu, Saudara², saja sekali lagi sekarang ini dihadapan jullie smuanja, saja katakan jullie oleh karena saja anggap Saudara² itu sedarah sedaging dengan saja, kepada jullie semua saja menghargap, djangan jullie je kop verliezen, djangan jullie ikut² terbakar semangatmu, sentimenmu. Tapi tetaplaj arahkan engkau punja alam fikiran itu kepada perintah daripada Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi dan kepada perdjjoangan

terhadap kepada Nekolim. Insja Allah, Saudara²! Insja Allah, kalau saja sudah mempunyai picture, saja akan mengadakan political solution, saja akan mengadakan pemertjahan. Insja Allah, dengan bantuan daripada Tuhan Jang Maha Esa jang saja muhurn. Saja tidak the all wise man, tidak. Tetapi saja selalu minta tulung daripada Tuhan Jang Maha Esa, supaya memberi pimpinan kepada saja. Ihdinas sireto mustaqim. Pimpinlah aku didjalan jang benar. Tundjukkan kepadaku djalan jang benar. Tidak lupa itu aku utjapkan.

Tetapi sebelum aku mengadakan political solution aku ingin mengetahui proloog sebenarnja, fakta sebenarnja, nalooq jang sebenarnja. Dan segala sesuatu didalam objectiviteit.

Saudara², didalam sidang KOTI jang achir, ini rahasia, rahasia jang saja berikan kepadamu, saja perintahkan kepada Staf, buat bagi saja rantjangan tiga komando. Komando jang akan saja berika kepada rakjat mengenai kedjadian 30 September ini. Salah satu daripada tiga komando ini, salah satu daripada tiga rantjangan ini belum bisa saja terima sehingga nanti akan saja berikan komando pada Saudara². Sebagai jang sudah Saudara² batja disurat kabar dan dengar dari radio hanja di Komando jang belum saja mau terima itu. ja belum saja mau issuekan, jang belum saja mau berikan, saja mau djalankan ialah, komando jang di sekarang djuga telah, seperti menetapkan, ini salah, ini salah, ini salah ini salah.

Jah, saja tahu, membunuh orang itu bukan perbuatan jang bisa dibenarkan. Dan saja terangkan bodoh itu, salah, kedjadian 30 September membunuh mati djenderal², salah ! salah ! salah ! Dan saja marah tentang kedjadian itu. Tapi untuk menjeleskan segala ini, pada saat sekarang ini belum saja anggap waktunja, sebelum saja mempunyai Darstellung daripada semua fakta, fakta proloog, fakta faktanja sendiri, fakta nalooq. Saja belum membicarakan komando jang ketiga ini

Sebagian daripada Saudara² adalah jurist. Jang agar supaya sebagai hakim mendjalankan hukum itu lebih dulu harus mengadakan voorlopig onderzoek. Dari voorlopig onderzoek itu Saudara² belum mendapat picture sedikit. Polisi mengadakan voorlopig onderzoek, diberikan kepada Djaksa, Djaksa pun mengadakan voorlopig onderzoek. Kemudian, nanti, dalam bahasa Belanda, diberikan kepada rechter commissaris. Rechter commissaris periksa lagi, periksa lagi, ini pantas mendapat rechts-ingang apa tidak, ini pantas mendapat rechts-ingang apa tidak. Kalau rechter commissaris mengatakan, ini pantas mendapat rechts-ingang, baru diberikan kepada hakim untuk terus menjelesaikan dan melidikinja. Tapi kalau mandek kepada rechter commissaris, rechter commissaris berkata, no. no. belum tjukup penjelidikan, penjelidikan. Rechter commissaris kembalikan ini lagi kebawah, supaya lebih disidik.

Nah, saja mau berbuat demikian, Saudara². Beliau saja mau objectief menjelidiki, menjelidiki hal lebih dahulu. Dan untuk itu saja minta ketenan

tenangan. Dan saja sudah berkata, baik didalam negeri, maupun keluar negeri, Insja Allah, saja akan hukum siapa jang berbuat makar, saja akan hukum apa jang salah. Hukum jang bagaimanapun djuga. Tetapi Saudara², saja djuga menghadapi political issue daripada kedjadian ini, karena itu saja musti betul² cautious. Cautious dalam arti djangan gegabah. Kumpulkan fakta² objectief dulu. Dan saja di telah berkata, fakta objectief apa? Proloog, fakta, loognja. Dan tentang naloognja saja sudah me- nat dengan sedih, veel is bedorven door ons zelf. ng tadinja sekadar, katakanlah soal nasional, se- rang sudah mendjadi internasional.

Hah, pikirlah, apa jang terdjadi dengan RRT itu, ta sudah mendapat protes dari RRT. Karena apa? , ada satu kedjadian di trade commissioner RRT. hkan kemarin dulu atau kemarin, datang lagi satu djadian, didjalan Petamburan. Apa pokoknja, abnja? Ja terlalu terbakar sentimen. Terbakar timen oleh apa? Oleh pentol² kita sendiri. Sudah rang tentu pemuda² membatja surat kabar. Misal- i seperti itu, Djuanda mati karena kena ratjun, atjun. Itulah design, arti isi daripada tulisan itu. h, sudah barang tentu pemuda lantas marah ke- la RRT Balas dendam. Trade commissioner RRT erbu. Djati Petamburan, kemarin atau kemarin lu, diserbu.

Kemarin dulu lagi saja dapat laporan. Ada orang Pondok Gede, orang biasa di Pondok Gede. Orang Pondok Gede didatangi orang berpakaian seran, ditembak mati. Majatnja dinaikkan dalam jeep, awa in de richting van Lobang Buaja. Dan rupa- oleh karena konangan (ketahuan) penembakan ti dan pembawaan in de richting van Lobang aja itu, karena konangan, banting setir, dibawa laerah Klender. Jang sekarang saja masih me- nggu laporan² dimana majat itu dan oleh siapa. ua laporan jang sampai kepada saja voorlopig h, 6 orang jang berpakaian seragam. Nah, ini jadian jang begini ini apa? Saja sebagai orang g mau objectief, hasil daripada pembakaran se- ngat, hasil daripada pembakaran semangat. Zo nen wij door gaan. Kalau tidak berhenti pema- in semangat ini, zo kunnen wij toch niet door n. Tiap² kali akan kedjadian jang demikian itu. ah pembakaran rumah Tionghoa, entah rasia- ie, entah ada lagi seperti jang kemarin dulu ter- li di Pondok Gede, entah apa jang terdjadi, en zo nen wij er nooit. Karena itu saja minta jullie, e, jullie allemal mengerti saja punja perintah ini, gerti saja punja garis pimpinan daripada olusi ini.

aja tadi berkata, bahwa telah saja komandokan komando. Tjoba, dua komando ini akan saja t. Sebab, again, again, again, lagi, lagi, lagi, an komando ini, jang engkau Achmadi, je hebt voorgelezen aan wartawan. Tjara mentjetaknja a sudah tidak benar. Kena apa? Ja, tetapi kau s controle bagaimana disurat kabar ini di- snja.

Saja menghendaki komando saja ini ditjetak di- surat kabar woordelijk en precies sebagai saja berik- kan kepadamu, dari KOTI. Saja didalam sehari-hari ini marah, kanan-kiri marah, kanan-kiri marah, en iedereen krijgt van mij op zijn kop. Ja, tjoba saja buktikan, nanti, bahwa komando jang saja issue tidak seperti ditjetak didalam surat kabar. Saja tidak tahu ini, apa ini sengadja, apakah ketololan daripada wartawan ini, saja tidak tahu. Tetapi njata tidak sesuai dengan teks jang saja berikan kepadamu, Menteri Penerangan Achmadi.

Komando Pertama : Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemim- pin Besar Revolusi kepada seluruh slagorde Dwikora.

Untuk mengatasi akibat² peristiwa „Gerakan 30 September” dalam melaksanakan konfrontasi ter- hadap Nekolim, maka dengan ini saja perintahkan : satu, hindari segala tindakan jang dapat merugikan perdjongan kita. Dua, tingkatkan dan sempurnakan segenap slagorde Dwikora jang telah dipersiapkan. Tiga, kerahkan seluruh potensi guna kesempurnaan dan keamanan ketahanan revolusi. Djakarta, 21 Oktober 1965. Presiden/Panglima Tertinggi Ang- katan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi, Sukarno.

Saja batja sekali lagi dan nanti saja minta, semua utusan dapat precies sebagai jang didalam tangan saja ini.

Satu, hindari segala tindakan jang dapat merugi- kan perdjongan kita. Hindari segala tindakan jang dapat merugikan perdjongan kita. Perdjongan kita apa? Perdjongan kita in zijn geheel! Per- djongan Revolusi kita ini! Perdjongan kita ter- hadap kepada Nekolim. Perdjongan kita menjusun masjarakat jang adil dan makmur. Perdjongan se- gala daripada Pantja Azimat Revolusi seluruhnja. Hindari segala tindakan jang dapat merugikan per- djongan kita. Nah, jullie musti mengerti perkataan perdjongan kita itu apa? Perdjongan kita in zijn geheel, perdjongan revolusi kita. Pantja Azimat, itulah perdjongan kita. Trisakti itulah perdjongan kita. Menghantam hantjur lebur „Malaysia”, itulah perdjongan kita. Djangan lupa hal ini.

Saudara² dari Pantja Tunggal, concentreer jullie punja fikiran disini.

Dua, tingkatkan dan sempurnakan segenap slag- orde Dwikora jang telah dipersiapkan.

Tiga, kerahkan seluruh potensi guna kesempur- naan dan keamanan ketahanan revolusi, **ketahanan revolusi!** Apakah bangsa kita bisa tahan revolusi ini, djikalau bangsa kita sebagai dua harimau ber- hadap-hadapan satu sama lain?! Mau menerkam satu sama lain?! Revolusi kita hanja bisa mem- punjai ketahanan, kalau bangsa kita kompak bersatu progresif revolusioner. Mengertikah engkau itu semuanya?

Djangan terpukau, terbakar oleh sentimen². Komando kedua.

Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi, tentang tindakan pengamanan revolusi. Pengamanan **Revolusi!**

Kami, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, menjabari bahwa sebagai akibat daripada peristiwa apa jang dinamakan Gerakan 30 September, telah timbul fakta² dan gejala² jang membahayakan dan mengantjam sendi² kehidupan kenegaraan dibidang politik, ekonomi sosial dan kebudayaan, jang akan berpengaruh pada peningkatan kesiap-siagaan, baik mental maupun fisik dalam menghadapi musuh revolusi Nekolim, dalam rangka penyelesaian revolusi, maka demi tertijptanja suasana tenang dan tenteram, serta pulihnja keamanan dan ketertiban umum, sebagai sjarat mutlak untuk mengamankan usaha² mentjapai tudjuan revolusi, saja komandokan kepada segenap aparat negara bersama-sama dengan seluruh rakjat untuk : satu, selalu membina kesatuan dan persatuan seluruh kekuatan nasional progresif revolusioner, atas dasar Pantja Azimat Revolusi.

Dua, menjingkirkan djauh² tindakan² destruktif seperti : rasialisme, pembakaran² dan pengrusakan².

Tiga, menjingkirkan djauh² fitnahan² dan tindakan² atas dasar perasaan balas-dendam.

Empat, melarang semua demonstrasi² jang tidak terlebih dahulu mendapat izin dari jang berwadajib.

Lima, terus meningkatkan aksi² massa jang revolusioner setjara konstruktif dan dengan disiplin nasional jang tinggi — disini saja tjetak dengan letter kapital dan onderstreep pula — **DALAM MENGHADAPI NEKOLIM DAN SEGALA SIASAT SUBVERSINJA**. Saja ulangi lima ini. Terus meningkatkan aksi massa jang revolusioner setjara konstruktif dengan disiplin nasional jang tinggi **DALAM MENGHADAPI NEKOLIM DAN SEGALA SIASAT SUBVERSINJA**.

Disurat kabar kapital² letters ini tidak muntjul, onderstreeping tidak muntjul, sehingga orang mengira, nou ja, ini malah kami diperintahkan, meningkat aksi² massa revolusioner.

Masja Allah, masja Allah! Saja perintahkan kepadamu, koreksi disurat kabar surat kabar! Semoga Tuhan Jang Maha Esa melimpahkan taufik dan hidajatnja kepada kita sekalian.

Saja batja sekali lagi lima ini. Satu, selalu membina kesatuan dan persatuan seluruh kekuatan nasional progresif revolusioner atas dasar Pantja Azimat Revolusi.

Dua, menjingkirkan djauh² tindakan² destruktif, seperti rasialisme. Djawa Timur telah terdjadi beberapa kedjadian rasialisme. Disinipun pembakaran² dan pengrusakan². Saja perintahkan kepadamu, larang hal jang demikian ini! Siapa jang mengadakan perusakan atau pembakaran, dan sudah engkau larang mereka masih membakang, tembak mati!

Dengar saja punja perintah! Sebab in het gaat om de revolutie, Saudara². Menjingkirkan djauh² tindakan² destruktif seperti rasialisme, pembakaran² dan pengrusakan².

Tiga, menjingkirkan djauh² fitnahan² dan tindakan-tindakan atas dasar perasaan balas-dendam. Hoo, hal balas-dendam, Saudara², ada balas dendam politik, ada balas-dendam ekonomi, ada balas-dendam persoonlijk, semuanya itu sekarang dipergunakan. Sekarang ini modenja, mode, sesudah tanggal 30 September mode ialah, kami anti 30 September, kami veroordelen 30 September, dia ikut 30 September, dia ikut 30 September, dia ikut 30 September. Mode itu sekarang. Sebagian oleh karena ja, men vil selamat zijn, dus menjatakan anti 30 September, taat, tjinta, mendjundjung tinggi Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia Pemimpin Besar Revolusi etc., etc., etc., etc. Sebaliknja jaitu, ini, ini, ini, orang 30 September. Saja dapat beberapa laporan tentang hal ini, Saudara

Misalnja, didalam satu perusahaan. Ja, satu perusahaan ada dua pemimpin dalam perusahaan itu jang satu sama lain sudah tidak setudju, pertentang terus. Pokoknja mereka itu dua-duanja keping mendjadi Presiden Direktur daripada perusahaan itu. Nah, kedjadian ini terus sadja, Saudara². Jang satu mengatakan, tidak baik, dia itu orang 30 September. Aku jang baik, aku jang tidak setudju dengan 30 September, aku sepiantasnja mendjadi Presiden Direktur. Satu tjontoh. Fakta ini, Saudara², fakta. Jang malahan didalam tangan saja untuk menjelesaikan.

Ada lagi fakta lain. Djuga dua pentol. Sebetulnja pokok mereka punja pertentangan itu apa? Rebutan awewe. Ja. Patjar dari si A ini banting setir pincup kepada si B. Ja, patjar daripada si A sekarang mendjadi patjar si B. Dus si A sudah mendongkol si B. Si A melaporkn, B itu memang orang 30 September, orang tidak boleh dipertjaja. Padahal pokok itu, pokoknja itu, Saudara². Saja suruh selidik sama sekali tidak benar, bahwa si orang B itu adalah orang 30 September. Tetapi benar bahwa patjarnya A sekarang ini ditangan si B. Ini beberapa tjontoh sadja, Saudara², jang bukan sadja terdjadi Djakarta, tetapi sudah barang tentu didaerah² djawa. Karena itu aku masukkan didalam komandoku untuk menjingkirkan djauh² fitnahan² dan tindakan² atas dasar perasaan balas-dendam.

Ada lagi. Saja tadi berkata, ada politik, ekonomi, ada persoonlijk. Ekonomi misalnja. Saja memang satu golongan, ekonomi ini. Saja katakana ja sudahlah, golongan pedagang. Jang dari dulu dari dulu bertahun-tahun sudah dia selalu mendjaja saingan dan mendapat pukulan² daripada pahlawan Tionghoa didalam hal perdagangannja. Ja memang sudah lazim, Chinezen zijn pienterder dan wij orang panganan perdagangan. Tetapi ini lantas ditunggal oleh si-golongan kita jang ekonomis selalu mendjaja saingan atau dampratan atau pukulan dari pahlawan Tionghoa itu. Katakan, dilaporkan ke

ja, golongan itu sebetulnja itu komunis, RRT, engikutnja daripada 30 September. Padahal pokok-nya itu in deze golongan, A, voor het eerst van zijn-ven dia ikut² bitjara tentang politik. Dia dulu itu uma tjari uang, tjari uang, tjari uang dengan da-ang, dengan dagang. Tetapi selalu dia punja peng-laman ialah mendapat saingan dan pukulan daripada hahk Tionghoa ini. Ha, sekarang mooie gelegenheid ntuk dia punja saingan itu ditjurigai atau dipukul leh Pemerintah!

Politik, demikian rupa. Ada dua golongan jang adah bertahun-tahun dari dulu opposed to each other. Biasa didalam to each other. Tetapi sekarang, ebruik maken daripada sentimenten sekarang. Jang itu itu mengatakan, lha betul apa tidak aku dulu erkata demikian, itu golongan 30 September.

Pendek kata, Saudara², kita jang harus mendjaga volusi ini, kita harus betul hati². Hati², sebagai di kukatakan, Pantja Azimat, pegang teguh kepada antja Azimat ini. He, orang² dari Pantja Tunggal, antja Azimat itu apa? Salah satu daripada Pantja zimat, nomor satu ialah, Nasakom. Nasakom, antjasila, Manipol-Usdek, Trisakti, Berdikari; lima antja Azimat.

Sekarang ini, Saudara², sesudah ada kedjadian ini, dik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, ang bertanja, bagaimana sekarang Nasakom? ernjata ja, Nasakom itu tidak baik. Go to hell, asakom tidak baik. Nasakom adalah baik! Oleh irena baik Nas, maupun A, maupun Kom, adalah tu aangezich reeel daripada Revolusi kita ini. Saja lak berkata, Kom is P.K.I. Saja djuga tidak ber-ita, Kom is P.S.I., Tidak! Saja tidak berkata, om is Aidit, tidak! Tetapi Kom sebagai satu alitas didalam Revolusi kita adalah tidak bisa di-ntah. Berpuluh-puluh tahun jang lalu saja sudah rkata, dan barusan ini diumumkan; Sukarno, oleh karno sendiri. Tulisan Dibawah Bendera Revolusi, kala aku mendjadi pembantu dari pada surat kabar 'emandangan". Batja. Maka saja menulis, karena ja sekarang mendjadi pembantu surat kabar 'emandangan" adalah baik untuk pembatja² 'emandangan" mengetahui Sukarno itu apa? Lantas ja tulis, Sukarno, oleh Sukarno sendiri. Dan disitu ja telah katakan pula hal ke-Nasakom-an saja ini. ben nationalist, ik ben Islamiet, socialist. Tiga in e. Three in one, Sukarno. Lain kali disini, dimuka ana Merdeka saja pernah berkata, aku adalah rasan daripada Nasakom, perasan. Oleh karena a? Nas adalah satu roman muka, roman daripada volusi kita. Kom dalam arti Marxist, Sosialis ada- roman daripada Revolusi kita.

Kenapa Nas, roman Revolusi kita? Ja, Revolusi i adalah, lihat, — ingat kepada Pantjamuka —, volusi kita adalah nasional. Satu muka adalah ionale muka. Didalam muka nasional ini terutama ali rasa nasionalisme, jang mendjadi pendorong. g mendjadi motor. Kita ingin berdiri sendiri agai bangsa. Kita ingin mempunyai negara sen- . Kita ingin mempunyai negara sendiri. Kita

ingin mempunyai negara berdaulat sendiri. Terutama sekali nasionalisme adalah motor daripada revolusi nasional ini.

Tapi djuga A. Agama didalam zaman kolonial se- lalu ditekankan. Terutama sekali agama Islam, ditekan-tekan. Bahkan sama sekali diadakan pada waktu itu Adviseur voor Inlandse Zaken jang peker- djaannja terutama sekali ialah, ngintjer hal agama ini. Dan orang ahirnja tidak bebas mendjalankan agama. Sudah barang tentu dari kalangan rakjat ingin satu masjarakat jang bebas agama. Oleh karena itulah maka orang agarna ini lantas join, ikut didalam revolusi. Didalam revolusi tahun '45, salah satu barisan jang terkuat ialah, barisan agama. Bukan Nas sadja, Agama. Dus agama, atau keinginan bebas agama adalah satu roman muka reeel daripada Revolusi kita ini.

Demikian pula socialistische aspiratie, jang sos ataukah jang Marxist atau jang Kom, itu adalah roman muka reeel daripada Revolusi kita ini. Oleh karena apa? Aku terangkan ini kepada wartawan² Djepang, sehingga merekapun manggut² dan me- ngerti. Imperialisme membuat kita ini volk, bangsa van koelies. Hidup didalam gubuk² jang botjor. Makan dengan 2½ sen seorang sehari, sebenggol sehari. Een volk van paupers, tidak mempunyai education, tidak mempunyai social life jang pantas, jang lajak. Sudah barang tentu rakjat jang demikian itu dihasut atau tidak dihasut, ada pemimpin komunis atau tidak ada pemimpin komunis, mempunyai socialistische aspiraties. Sudah barang tentu. Dus Kom adalah satu roman muka reeel dari pada Revo- lusi kita ini. Nas roman muka reeel. A roman muka reeel. Kom roman muka reeel. Tidak bisa orang mengadakan revolusi ini tanpa socialistische dan tendenzen. Tidak bisa orang mengadakan revolusi ini tanpa nationale, nationalistische aspiraties dan tendenzen. Tidak bisa orang mengadakan revolusi sekarang ini tanpa religieuse aspiraties dan ten- denzen. Ketiga²nja adalah realitas. Oleh karena itu maka saja sebagai Pemimpin Besar, bahkan sebelum daripada tahun '26 saja sudah katakan, samenbun- deling van alle revolutionaire krachten, jang berupa — waktu itu saja katakan —, Nationalisme, Islamis- me. Marxisme. Kemudian perkataan baru : Nasakom. Ini ditanjakan oleh wartawan² Djepang, ditanjakan oleh masjarakat kita djuga. Saja berkata, tetap, tetap Revolusi kita hanya bisa selamat, diikalau Nasakom ini diganggu sedikitpun, sebagai Nasakom, sebagai persatuan dan kesatuan daripada tiga realitas dida- lam revollusi dan masjarakat kita, Revolusi kita akan mendjadi lemah. Saja tidak berkata, bahwa Nas is dus Ali Sastroamidjojo, tidak. Saja tidak ber- kata, bahwa Nas is dus Asmara Hadi, tidak. Saja tidak berkata, bahwa A is dus Idham Chalid atau Sjaichu atau Subchan. tidak. Saia tidak berkata, bahwa Kom is dus Aidit, tidak, tidak, sama sekali tidak. Tetapi Nas dan A dan Kom adalah roman muka reeel daripada Revolusi kita ini. Jang ketiga- tigania harus kita persatukan agar supaia Revolusi kita benar² mendjadi satu revolusi jang kuat.

Pertanyaan ini akan engkau hadapi didaerah. Maka itu, mengertilah apa jang saja terangkan di sini dan berilah djawaban seperti aku memberi djawaban ini kepada rakjat jang menanjakan kepadamu didaerah.

Sebab ada sudah suara², huh, tanpa Kom revolusi bisa berdjalan terus. Tanpa Kom revolusi bisa berdjalan terus. Mana bisa! Sebelum ada Aidit, sebelum ada PKI; gerakan nasional kita sudah mempunyai socialistiche tendenzen. Djamannja, o Aidit belum lahir, djamannja PKI belum berdiri, itu sudah socialistiche tendenzen, sudah tumbuh, sudah timbul. Malahan kalau mystiek bezien, mystiek, sebelum abad ke 20 ini, dengan adjaran² Ratu Adil, dengan adjaran² Samin, itu pada pokoknja socialistiche ideologieen. Saminisme is socialistic. Ratu Adil is socialistic. Bahkan aku tempo hari disini pernah berpidato mengatakan, bahwa dalang dengan utjapan² gemah-ripah loh-djinawi, etc., etc., etc., sebetulnja menggambarkan socialistiche ideologie daripada bangsa kita.

Djadi djikalau nanti didaerah ada orang bertanja, bagaimana itu Kom dari Nasakom? Bapak Presiden

sebagai Pemimpin Besar Revolusi tetap mengatak bahwa Nasakom adalah perlu mutlak untuk Revolusi kita ini.

Lain perkara oknum. Itu lain perkara. Saja djwb berkata, bahwa Angkatan Darat perlu mutlak, t lain perkara djuga oknum. AURI mutlak perlu, t lain perkara. Tetapi sebagai roman muka daripada revolusi adalah satu realitas jang harus kita pergunakan dan kita pupuk. Anders kita tidak bisa me bikin Revolusi kita ini kuat.

Wel, Saudara², demikianlah amanat saja, saja telah berkata, memerintahkan kepada Sekreta Koti supaja semua Saudara² mendapat komando j dua rupa itu ditangan Saudara², dan kerdja komando itu didaerah.

Dan Menteri Penerangan, tandaskan kep semua surat kabar, perkataan jang kapital geschre onderstreept, harus djuga djelas onderstreept kapital didalam surat kabar².

S e k i a n.



Pemandangan dalam salah satu industri makanan dalam kaleng di Denpasar, Bali.

PETUALANGAN KONTRA-REVOLUSI "G-30-S" MENGANGGU KEAMANAN REVOLUSI

**Mari kita bersikap tegas dan
bidjaksana.**

Menko Hubungan dengan Rakjat/Ketua Panitia Pembina Djiwa Revolusi Dr. H. Roeslan Abdulgani dalam sambutannya dalam rangka merajakan pergantian genap 37 tahun usia Hari Sumpah Pemuda mengingatkan pemuda² Indonesia bahwa revolusi kita dewasa ini sedang mengalami gangguan² ke-nanannya, akibat terdijadinja petualangan kontra-revolusi apa jang menamakan dirinja „Gerakan 30 ptember”.

Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus menum-snja. Sebab, kalau tidak maka seperti apa jang dikatakan dalam Komando Presiden kita : „Fakta² hidupan kenegaraan dibidang politik, ekonomi, sial dan kebudayaan” akan terus mendjadi².

Dalam situasi tanah air kita dewasa ini Dr. Roeslan berseru kepada pemuda² Indonesia dimana-ia berada untuk terus memegang teguh kewas-daan revolusioner, meningkatkan terus aksi² volusioner dalam menghadapi Nekolim dengan se-la siasat subversipnja.

Njalakan terus djiwa Sumpah Pemuda kita jang triotik dan berkerakjatan itu. Njalakan terus api-a revolusi kita jang berdjiwa Pantja Sila itu. laksanakan terus Pantja Azimat Revolusi kita.

Djiwa baru.

Hari Sumpah Pemuda ialah hari keramat dan ri-bersedjarah; hari Sumpahnja Pemuda² Indo-sia, jang tjinta kepada Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Tigapuluh tudjuh tahun jang lalu, jaitu pada tang-l 28 Oktober 1928 mengumandanglah sumpah — ia-nja Pemuda² Indonesia kepada Ibu-Pertiwi, ngan trilogi-nja, jaitu : ber-Tanah-Air satu, Tanah-r-Indonesia.

ber-Bangsa Satu, jaitu Bangsa Indonesia.
ber-Bahasa Satu, jaitu Bahasa Indonesia.

Dewasa itu Ibu Pertiwi masih dibelenggu oleh kolonialisme dan Imperialisme; masih menderita penindasan dan penghisapan asing; masih menderita setjara lahirijah dan setjara batinijah. dan dan djiwanja laksana dirobek-robek oleh poli-tik adu-dombanja kolonialisme, oleh tipu-muslihat ide-et-imperanja imperialisme.

Namun demikian pemuda² Indonesia, sebagai tra-putri sedjati dari Ibu-Pertiwi tidak tinggal m, tidak hanjut karena penindasan dan penghi-



*J.M. Menko Hubra/Ketua Panitia Pembina Djiwa
Revolusi Dr. H. Roeslan Abdulgani*

sapan itu. Mereka bangkit dan ditengah-tengah an-tjaman kolonialisme-imperialisme mendengungkan djiwa baru, jaitu djiwa persatuan dan kesatuan Bangsa. Tidak sedikit risiko jang harus diambil oleh Pemuda² kita pada waktu itu. Tidak sedikit rintangan dan bahaya jang harus dihadapinja. Namun rasa tanggung-djawab terhadap Ibu Pertiwi, dan rasa-setia-kawan kepada Amanat Penderitaan Rakjat, mendjadikan pemuda² kita 37 tahun jang lalu itu laksana banteng² ketaton melawan segala rintangan dan bahaya dari Imperialisme dan Kolonialisme itu.

Politik adu-domba dan divide-et-impera-nja kaum imperialis dan kolonialis harus dilawan setjara mati²-an. Dengan didjiwai oleh Angkatan Pendobrak dari Penggerakan Nasional kita, jaitu jang dipelopori dan dipimpin oleh Bung Karno pada tahun 1927, bang-kitlah djiwa pemuda² kita; dan bersumpahlah me-

reka seperti apa jang pernah diserukan oleh Pudjangga Djerman Schiller dalam karyanja „Wilhelm Tell” :

„Wir sind ein Volk, und einig wollen wir handeln,

Wir wollen sein ein einzig Volk von Brudern,
In keiner Not uns trennen und Gefahr.”

Jang artinja adalah kurang lebih :

„Kita adalah satu bangsa, dan dalam kesatuan kita ingin bertindak,

kita ingin mendjadi hanja satu bangsa bersaudara,

dan tidak akan meninggalkan masing² dalam kesukaran dan bahaya”.

Tjamkan benar².

Memang kita ingin menjemen persatuan dan kesatuan Bangsa.

Sebab tanpa persatuan dan kesatuan bangsa kita tidak dapat menjusun kekuatan, baik lahiriah maupun batiniah untuk mentjapai Indonesia Merdeka. Dan Djiwa persatuan dan kesatuan bangsa itu tidak akan dapat tumbuh dan hidup, kalau tidak disumberi oleh djiwa patriotisme jang menjala-njala dan oleh Ampera.

Tjamkan benar² hal ini. Persatuan dan kesatuan Bangsa tidak dapat hidup dan tumbuh, kalau tidak disumberi oleh Patriotisme dan oleh Amanat Penderitaan Rrakjat. Patriotisme adalah hubungan ketjintaan jang ghaib antara setiap manusia dengan tanah-kelahirannja. Ia adalah termasuk hubungan ghaib antara manusia sebagai machluk Tuhan terhadap Tuhan sendiri sebagai Al-Chaliq-nja. Karena itu menurut adjaran Islam patriotisme atau tjinta kepada Tanah-Air termasuk dalam Iman. Ke-imaan kita tidak akan lengkap, kalau kita tidak mentjintai Tanah-Air kita, sebagai Amanat Tuhan kepada kita semua untuk kita djajakan, kita makmurkan, kita harumkan ditengah-tengah kehidupan Bangsa² lain.

Apabila patriotisme itu termasuk adjaran² Islam, maka adjaran² agama lainjapun tidak kurang djiwa patriotisme-nja. Saja dalam hubungan ini teringat kepada sembojannja ummat Katolik :

Pro Patria et Ecclesia, jaitu Pro Tanah-Air dan Pro Geredja, jang mengandung arti, bahwa siapa jang ingin membesarkan Tanah Airnja.

Demikianlah djiwa Patriotisme jang menjumbang negeri kesatuan dan persatuan Bangsa Indonesia. Sumber jang lain daripada kesatuan dan persatuan itu ialah Amanat Penderitaan Rakjat, jaitu suatu rasa kesetia-kawanan jang mendalam antara kita dengan duka-derita daripada Rakjat kita sepanjang sejarah.

Apabila Patriotisme memberikan djiwa religieus kepada persatuan dan kesatuan Bangsa, maka Amanat Penderitaan Rakjat memberikan djiwa kerakjatan

serta djiwa sosialisme kepada persatuan dan kesatuan Bangsa. Dengan demikian maka nasionalisme Indonesia adalah suatu nasionalisme jang ber-Ketuhanan, suatu nasionalisme jang ber-Kerakjatan, suatu nasionalisme jang ber-Keadilan-sosial. Dan last but not least suatu Nasionalisme jang tidak sempit, tidak "narrowminded", tidak "jingostis", melainkan suatu nasionalisme jang sadar akan tugas-internasional-nja, tidak mau sombong terhadap bangsa-lain, tetapi tidak mau disombongi pula oleh bangsa-lain.

Iniilah dasar-djiwanja daripada Hari Sumpah Pemuda kini kita rajakan bersama. Hari Sumpah Pemuda merintis pertumbuhan nasionalisme jang patriotik, jang religieus, jang demokratis dan jang sosialistis. Karena itulah sudah pada tempatnja bila kita merajakan Hari Sumpah Pemuda jang ke-37 itu dengan penuh kechidmatan dan penuh kemesraan

Masalah "G-30-S".

Lebih-lebih lagi dalam situasi sekarang, dimana kita semua dengan sepenuh tenaga pikiran dan kekuatan sedang mengatasi akibat² daripada peristiwa petualangan kontra-revolusi „Gerakan September 30” jang baru lalu.

Saja, demikian Dr. Roeslan, tidak perlu lagi menerangkan disini apa sebenarnja „G-30-S” itu. Tjukup diulangi disini, berdasarkan fakta² dan pengakuan sementara daripada pelaku²nja, bahwa „G-30-S” itu adalah suatu coup untuk menjisihkan kepemimpinan Presiden Sukarno selaku Kepala Negara Perdana Menteri/Pemimpin Besar Revolusi/Panglima Tertinggi AB/dan selaku Mandataris MPRS. Coup ini didjalankan setjara bertingkat-tingkat. Tingkat pertama ialah menjingkirkan beberapa perwira-perwira tinggi kita dengan djalan terror untuk membuka djalan bagi terbentuknja Dewan Revolusi tanpa Bung Karno. Dalam tingkat kedua akan diusahakan untuk mendapatkan restu dari Bung Karno dan apabila restu ini tidak diperoleh, maka penjisihan Bung Karno setjara formil dalam tingkat pertama itu akan disusul dengan penjisihan dan penjinsiran Bung Karno setjara fisik-faktuil. Adapun dalih untuk tindakannja ini ialah fitnah tentang adanya Dewan Djenderal jang terdiri dari perwira² tinggi jang di-terror itu, jang hendak meng-coup Bung Karno, katanja. Dan lebih kedjam lagi ialah dalih pelaku²nja ini bahwa „Dewan Djenderal” melakuka Coup terhadap Bung Karno itu dengan bantuan dan kerdjasama dengan CIA, jaitu Badan Pusat Intelligence-nja Amerika Serikat.

Dalam hubungan ini kita harus berpedoman kepada suatu pegangan, jang pernah diadiarkan oleh Pemimpin Besar Revolusi kita, Bung Karno; jaitu andai-kata dalih tuduhan itu ada segi² indikasi dan bukti²nja, kena apa djalan terror dan coup haru ditempuh? Bung Karno semasa panas²nja pemberitahuan Dewan² separatis pada tahun 1956/1957 mendjelang pemberontakan PRRI/Permesta mengemukakan : "Non Tali Auxilio", djangan menjelesaika

l antar-kita, antar-rakjat kita, antar-bangsa kita ngan tjara dan djalan demikian. Inilah djiwa uan Bung Karno "non tali auxilio" tadi itu, jang ak membenarkan terror dan coup, melainkan se- a mengandjurkan musjawarah dan mupakat, se- tu dengan djiwa dan dasar serta filsafat Pantja- a.

Suatu penjelewengan dan pengingkaran.

Karena itu "G-30-S" baru² ini adalah suatu penje- lewengan, dan suatu pengingkaran terhadap Pantja- i kita. Karenanja, maka "Gerakan Petualangan" i itu tidak dapat dikatakan semata² soal intern- gkatan Darat kita, akibat salah-urus atau salah luk belaka, melainkan merupakan suatu masalah sional jang menjangkut sendi² kehidupan Bangsa, gara dan Revolusi kita.

Karenanja, maka berkali-kali Presiden kita, semula am Amanat-Radionja pada tanggal 3 Oktober t kemudian dalam Komandonja tgl. 21 Oktober tjerukan kepada seluruh lapisan masjarakat kita . Rakjat kita dari Sabang sampai ke Merauke uk terus membina kesatuan dan persatuan gsa. Dan kesatuan serta persatuan Bangsa itu us terus kita bina atas Dasar Pantja-Sila, jang h kita pantjarkan dalam Manipol Usdek, dan g kita pertegas dalam Tri-Sakti Tavip dengan angat Berdikarinja, dan jang keseluruhannja itu mangati oleh djiwa Nasakom, djiwa sintese an- t nasionalisme, agama dan sosialisme.

inilah inti-pokok daripada Amanat dan Komando siden kita, jang harus kita laksanakan dan kita matkan bersama. Dan Amanat serta Komando siden kita itu adalah sesuai dengan Djiwa Sum- P Pemuda 37-tahun jang lalu, jang djiwa Sumpah uda itupun telah dichianati oleh petualangan² tra-revolusi "G-30-S" baru² ini.

alahan Presiden Sukarno dalam Amanat dan nandonja itu menggunakan istilah pengamanan olusi. Dengan lain perkataan, maka ,dengan eruskan pembinaan persatuan dan kesatuan gsa kita semua harus mengamankan Revolusi . Mengamankan Revolusi berarti : mengamankan arnja, jaitu Pantja-Sila kita jang telah kita per- bangkan kedalam Pantja Azimat Revolusi; ia a berarti : mengamankan Tudjuannja, jaitu -Kerangka Tujuan Revolusi, jang dengan sing- dirumuskan sebagai menegakkan kemerdekaan, ibangun sosialisme dan Dunia Baru; ia djuga rti mengamankan Haluan dan Djalannja, jaitu ipol Usdek jang tetap kiri, dan tidak kanan, dan a tidak kedjalan ke-kanak²annja Links radi- mus.

Tidak boleh tinggal diam.

koknja, Revolusi kita dewasa ini sedang meng- i gangguan² keamanannja, karena petualangan a-revolusi "G-30-S" itu. Dan kita tidak boleh

tinggal diam. Kita harus menumpasnja. Sebab, kalau tidak maka seperti apa jang dikatakan dalam Komando Presiden kita : „Fakta² dan gejala² jang membahayakan dan mengantjam sendi² kehidupan kenegaraan dibidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan" akan terus mendjadi-djadi.

Akibatnja?

Akibatnja jalah tidak lain dan tidak bukan bahwa kekuatan kita, ketahanan kita, kesiap-siagaan kita, baik mental maupun physik dalam menghadapi musuh Revolusi Nekolim, akan merosot.

Karena itu maka demi tertiptanja suasana tenang dan tentram, demi pulihnja keamanan dan ketertiban umum, mari kita semua dalam merajakan Hari Sum- pah Pemuda jang ke-37 tahun terus membina per- satuan dan kesatuan Bangsa dari Sabang sampai ke Merauke, dari berbagai aliran jang progressip- revolusioner, atas dasar toleransi-positip, sesuai de- ngan sembojan „bhinneka tunggal ika”.

Tegas dan bidjaksana.

Mari kita bersikap tegas dan bidjaksana.

Tegas dalam arti kita membantu ABRI kita umumnja, AD/TNI kita chususnja dalam menin- dak kaum petualangan² kontra-revolusioner dari "G-30-S".

Bidjaksana dalam arti kata : "Non tali auxilio", jaitu djangan masuk perangkapnja kaum provokateur jang ingin mendjalankan tindakan² destruktip seperti rasialisme, pembakar dan perusakan².

Bidjaksana dalam arti kata : "Non tali auxilio", jaitu djangan ikut dalam fitnah. Mari kita hadapi fitnahnja kaum petualangan "G-30-S" dengan meningkatkan ke-iman-an kita, keichsanan kita dan ke- islaman kita.

Pegang teguh terus kewaspadaan jang revolusioner, tingkatkan terus aksi² revolusioner, dalam meng- hadapi Nekolim dengan segala siasat subversipnja.

Njalakan terus Djiwa Sumpah Pemuda kita, jang patriotik dan ber-kerakjatan itu. Njalakan terus Apinja Revolusi kita, jang berdjiwa Pantja-Sila itu. Laksanakan terus Pantja-Azimat Revolusi kita.

Hanja dengan demikian kita dapat menundjukkan kesetia-kawanan kita kepada Djiwa-Sumpah Pemuda kita 37 tahun jang lalu, kepada Revolusi kita, dan kepada Amanat Penderitaan Rakjat kita.

Sekali lagi : Rajakan Hari Sumpah Pemuda sechidmat-chidmatnja, sesuai dengan djiwa persatuan dan kesatuan Bangsa. Pertjajalah bahwa perdjoangan kita melawan Nekolim dan melawan sisa² "G-30-S" akan berhasil, selama kita tetap setia kepada Pantja- Sila kita dan tetap beriman dan ber-Tuhan, sambil tak berhenti-henti memohon taufik, hidajat dan Ridho-Nja, demikian sambutan Menko Dr. Roeslan Abdulgani dalam menjambut peringatan Hari Sum- pah Pemuda genap 37 tahun. (Antara) * * *

PENGAMANAN PERUSAHAAN² NEGARA/UNIT² PRODUKSI/PROJEK² NEGARA

Dalam menghadapi situasi dalam negeri, dengan adanya gerakan dari apa jang menamakan dirinja „Gerakan 30 September” jang terang²an kontra-revolusi, disinjalir dan terlihat adanya maksud²/langkah² dari golongan tertentu didalam negeri maupun aksi subversif dari Nekolim untuk mengadakan sabotase², pengambilalihan perusahaan², unit² produksi dan distribusi serta projek² setjara tidak sjah, penghambatan produksi dan distribusi, pengrusakan alat² produksi, alat² pengangkutan/komunikasi dan bahan² pangan serta hasil² perkebunan.

Maksud² dan langkah² jang demikian itu tidak dapat dibenarkan dan harus ditindak sekeras²nja, mengingat bahwa djustru pada tingkat perdjjuangan Dwikora jang semakin meningkat dewasa ini, semua funds and forces jang progresif revolusioner harus dimobilisir dan dikerahkan untuk meningkatkan ketahanan revolusi pada umumnja, chususnya ketahanan ekonomi untuk menghantjur-leburkan Nekolim.

Untuk mendjamin keutuhan, keamanan, kelangsungan/kelantaran produksi dan distribusi umumnja, chususnya pangan, bahan² ekspor, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, perindustrian serta penjaluran dan pemasaraan bahan² tsb. dan bahan² baku/penolong, keamanan alat² komunikasi baik laut, darat dan udara, sentral² dan gardu² induk listrik, instalasi air minum, bendungan-irigasi dan projek² industri, maka oleh Presidium Kabinet Dwikora R.I. telah dikeluarkan beberapa instruksi.

1. Dalam instruksinja **No. 46/D/Instr./1965 tgl. 16 Oktober 1965**, sedjadar dengan Instruksi P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi kepada Ketua G V KOTI, dengan kerdjasama jang erat dengan Pantjatanggal/Instansi jang berwenang, telah diinstruksikan kepada para Menko Kompartimen dan Menteri² sbb. :

- a. Mengambil langkah² atau tindakan² jang positif untuk mengamankan harta kekajaan Negara didalam dan Perusahaan² Negara/Unit² Produksi/Projek² Negara, didalam lingkungan Departemen masing².
- b. Mendjaga keamanan, keutuhan dan kelangsungan produksi dari Perusahaan² Negara/Unit² Produksi/Projek² Negara.
- c. Setiap pelanggaran atas hal² termaksud pada (a) dan (b) supaja ditindak dengan tegas, dengan meminta bantuan pada ABRI.
- d. Djika ada Perusahaan² Negara/Unit² Produksi/Projek² Negara jang telah diambilalih, supaja

segera diambil tindakan untuk mengembalikannya kepada status semula.

2. Dalam Instruksi Presidium Kabinet Dwikora R.I. **No. 47/D/Instr./1965** tanggal 20 Oktober 1965 kepada Para Menteri Koordinator Kompartimen dan Menteri jang membawahi, mengurus dan menguasai Perusahaan², Unit² Produksi, Projek dan Unit² Vital dalam rangka Pengamanan setjara fisik untuk membentuk Team Pengamanan dan Pengawasan pada tiap² Perusahaan, unit² projek dan unit² jang vital jang berintikan Hansip dan Ormas² jang setia dan patuh tanpa reserve kepada Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, dengan bekerdjasama jang erat dengan ABRI dan Pantjatanggal setempat dan dilakukan terus menerus selama 24 djam sehari. Dalam tindakan pengamanan ini tidak diikutsertakan oknum dan ormas² jang terlibat dalam „Gerakan 30 September.

Tugas Team Pengamanan dan Pengawasan ialah

- a. Membersihkan perusahaan dari oknum dan Ormas² jang tersangkut atau terlibat dalam „Gerakan 30 September”.
- b. Mengambil langkah² atau tindakan² jang positif untuk mengamankan harta kekajaan Negara didalam Perusahaan², Unit², Projek² dan Unit² jang Vital dalam lingkungannya masing-masing.
- c. Meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan dan mengambil tindakan² pengamanan terhadap semua usaha² sabotase/subversi, penghambatan dan penghentian produksi dan distribusi dalam arti jang luas, pengambil alihan perusahaan unit/projek² setjara tidak sjah, alat² pengangkutan/komunikasi, bahan² pangan, sentral² dan gardu² induk listrik, instalasi airminum, bendungan-irigasi dan projek² industri.

Telekomunikasi.

- a. Dalam keadaan darurat dewasa ini tetap melancarkan perdagangan Luar Negeri dengan memakai „MESSAGE CENTRE” jang telah dibentuk oleh Departemen Perdagangan dan dapat dipergunakan baik oleh Perusahaan² Negara maupun Perusahaan Swasta, dengan alar kawat „DEPDA DJAKARTA INDONESIA”.
- b. Segera memperbaiki alat² telekomunikasi dengan luar negeri.

Masalah keuangan : Segera mengatasi kesulitan keuangan jang diakibatkan oleh Gerakan kontra-revolusi dari apa jang menamakan dirinja „Gerakan 30 September”, terutama bagi pembiajaan Projek

fandataris dan projek² Vital, sebaliknya pengan-
garan-pengeluaran jang tidak urgen supaya di-
atasi.

Membentuk Team² · Penerangan/Indoktrinasi
ang dibekali dengan bahan² jang diamankan dan
dikomandokan oleh PJM Presiden/Pangti ABRI/
emimpin Besar Revolusi mengenai masalah
Gerakan 30 September". Didalam memberikan
enerangan/indoktrinasi jang seluas²nja itu harus
iadakan kerdjasama jang erat dengan Pantjatunggal
tempat.

Melaksanakan instruksi ini dengan segera dan
melaporkan pelaksanaannya kepada Presidium Kabi-
net Dwikora R.I. dalam waktu jang singkat..

Demikian Instruksi Presidium Kabinet Dwikora
o. 47/D/Instr./1965.

3. Dalam Instruksi Presidium Kabinet Dwikora
I. No. 48/D/Instr./1965 tanggal 20 Oktober
1965, kepada para Menko Kompartimen dan Men-
ri jang membawahi, mengurus dan menguasai
perusahaan², Unit² Produksi dan Distribusi,
Projek² dan Unit² Vital telah diinstruksikan untuk :

Mengharuskan oknum² dan ormas² dalam peru-
sahaan², Unit² Produksi dan Distribusi, Projek²
dan Sektor/Bidang Ekonomi lainnja, untuk me-

entukan sikapnja terhadap Amanat PJM Presi-
den/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi
Bung Karno pada tanggal 6 Oktober 1965 me-
negenai „Gerakan 30 September”.

- b. Sambil menunggu penyelesaian politik P.J.M.
Presiden/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revo-
lusi Bung Karno, **membekukan untuk sementara
semua kegiatan² ormas²** jang ada didalam peru-
sahaan Unit² produksi dan distribusi, projek²
dan sektor/bidang ekonomi lainnja, jang terlibat/
atau jang didapat indikasi jang kuat terlibat da-
lam petualangan kontra revolusi „Gerakan 30
September”.
- c. — Memberhentikan untuk sementara dari pang-
kat dan djabatannya, semua oknum² jang di-
duga terlibat dalam petualangan kontra
revolusi dari apa jang menamakan dirinja
„Gerakan 30 September”.
— Memberhentikan dengan tidak hormat dari
pangkat dan djabatannya, semua oknum² jang
njata² terlibat dalam petualangan kontra
revolusi dari apa jang menamakan dirinja
„Gerakan 30 September”.
- d. Melaksanakan instruksi ini dengan segera dan
melaporkan pelaksanaannya, kepada Presidium
Kabinet Dwikora R.I.

P.T. KAPOK INDONESIA

(PERUSAHAAN NEGARA)

PEMBELI, PENJUAL DAN EKSPORTIR TUNGGAL UNTUK HASIL
KAPOK INDONESIA

**TURUT SERTA MEMBANTU PEMERINTAH DALAM MEMPERBESAR EKSPOR,
HASIL BUMI INDONESIA DEMI SUKSESJNA REVOLUSI DALAM BIDANG
PEREKONOMIAN.**

Kantor Pusat :

Djl. R. Patah 33, Semarang
Tilp. Sm. 668
Cable : PTKAPOK SEMARANG.

Tjabang Djawa Tengah :

Djl. R. Patah 33, Semarang
Tilp. Sm. 649 — 1780
Cable : KAPOK SEMARANG.

Tjabang Djawa Timur :

Djl. Radjawali 5, Surabaya
Tilp. U. : 3658 — U. 3682
Cable : KAPOK SURABAJA.

Perwakilan Tegal :

Djl. Diponegoro 34, Tegal
Tilp. 242
Cable : PERKAPOK TEGAL.

Perwakilan Makasar :

Djl. Kalimantan 88, Makasar
Cable : PERKAPOK MAKASAR.

Perwakilan Djakarta :

Djl. Teuku Tjihik Ditiro 46
Flat 18, Djakarta
Tilp. Menteng 702
Cable : PERKAPOK DJAKARTA

S E R U A N

Dalam rangka penertiban dan melantjarkan roda perdagangan sehingga berdjalan se-lantjar-lantjarnja, maka diserukan kepada :

1. O. P. S.²
2. Pihak² jang berhubungan dengan pembiajaan guna kelantjaran perdagangan.
3. Pihak² jang bersangkutan dengan Telekomunikasi.
4. Pihak² jang berhubungan langsung dengan pengangkutan baik didarat, udara, laut maupun di sungai.

u n t u k :

Setjara tertib dan lebih giat menunaikan tugas masing², demi kelantjaran lalu-lintas barang jang sangat diperlukan oleh masjarakat.

Selandjutnja diserukan kepada :

O.P.S.² dan anggota²nja serta fihak² jang erat hubungannja dengan perdagangan, supaja dengan rasa kesadaran jang se-besar²nja dan patriotik sebagai warga-negara jang sedjati, untuk memberikan bantuan sepenuhnya kepada Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dalam rangka Operasi Pemulihan Keamanan, untuk mentjapai ketenteraman dan ketenangan, sesuai dengan jang diamanatkan P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

Untuk mentjapai proses pemulihan tersebut diatas diserukan kepada chalajak ramai baik jang nasional maupun warga negara asing agar menjdauhkan diri dari pada hasutan² jang dapat menimbulkan perbuatan² jang merugikan masjarakat, misalnja : sabotage, unsur pemetjah belah, penimbunan, manipulasi, pembakaran dsb.

Hendaklah masjarakat menghindarkan diri dari djaringan² desas-desus jang sengadja disebarkan oleh kaum Kontra Revolusioner untuk menimbulkan kepanikan dalam penghidupan perekonomian kita.

Djakarta, 16 Oktober 1965.

MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI/KUASA
MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI

t.t.d.

A. JUSUF

(Brig. Djenderal T.N.I.)

SERUAN INTERN

No. 038/MPDN/I/65.

Dalam menghadapi dan menanggapi situasi tanah air terutama sebagai akibat gerakan kontra revolusi dari apa jang menamakan dirinja „Gerakan 30 September” dan Nekolim dengan ini kami serukan kepada :

- a. golongan buruh Marhaenis
- b. golongan agama
- c. para karyawan lain-lainnja
dalam lingkungan Departemen Perdagangan agar supaja :
 - I. Tetap memelihara kesatuan dan persatuan dan terus memelihara ketenangan dan ketertiban serta mendjauhi segala hasutan, fitnahan jang dapat menimbulkan perpe-tjahan antara kita sama kita.
 - II. Tetap melakukan tugas Saudara masing² dengan ketekunan dan rasa tanggung djawab lebih daripada jang sudah².
 - III. Selalu memperhatikan dan melaksanakan pedoman² dan petunjuk² dari Pimpinan Departemen Perdagangan.
 - IV. Chusus mengenai amanat kami pada upatjara Appel Bendera tanggal 18 Oktober 1965 kepada para pegawai dihalaman Departemen Perdagangan, terutama mengenai penjebutan nama beberapa pegawai, bukanlah mempunjai maksud untuk melem-parkan tuduhan tertentu kepada mereka itu, melainkan hanjalah mempunjai maksud dan tudjuan agar semua pegawai meningkatkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan, dalam menunaikan tugasnja sehari-hari dalam keadaan dan suasana Negara kita dewasa ini.

Djakarta, 18 Oktober 1965.

**MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI/
KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR NEGERI,**

t.t.d.

(A. JUSUF)

(Brig. Djenderal T.N.I.)

BEBERAPA MASALAH DALAM BIDANG MARKETING TERNAK POTONG

Adalah sudah mendjadi kebiasaan masjarakat di mana-mana, bahwa semakin meningkat pendapatan masjarakat (national income) semakin meningkat pula konsumsinya. Khusus mengenai konsumsi pangan dengan meningkatnja pendapatan masjarakat consumption habit dari masjarakat pada pangan menundjukkan adanja trend konsumsi pangan jang lebih superior. Ditambah pula dengan madjunja pengetahuan masjarakat akan nutrition dan kesehatan lebih banjak bahan makanan jang mengandung protein hewani akan dimasukan dalam averagediet masjarakat. Kita melihat adanja shift dalam masjarakat dari bahan makanan jang lebih banjak mengandung carbohydrate kepada bahan makanan jang lebih banjak mengandung protein hewani.

Keadaan demikianpun sedikit banjak telah terdjadi di Negara kita jang ekonominja sekarang sedang berkembang dengan melaksanakan usaha pembangunan semestanja. Seperti telah kita saksikan dikota-kota besar dimana terdapat industri dan tingkat pendapatan masjarakat relatif lebih tinggi dari tingkat pendapatan masjarakat dilain tempat, permintaan (demand) pada bahan pangan jang lebih superior (jang mengandung protein hewani seperti daging, susu, telur dan sebagainya) tidak dapat dielakan dan bagaimanapun djuga harus dipenuhi.

Berhubung dengan itu, didalam menudju industrialisasi untuk mentjapai kemakmuran di Negara kita, bukan sadja investasi modal, tenaga kerdja jang ahli dan managerial skill jang merupakan faktor jang penting, tetapi djuga masalah pangan behubung dengan adanja trend dalam "consumption habit" masjarakat kearah pangan jang lebih superior harus kita petjahkan.

Selain dari pada itu ditindjau dari sudut kesehatan untuk mendjamin agar rakjat sehat dan kuat hal mana penting djuga bagi kelangsungan industrialisasi, masalah pangan tersebut semakin mendjadi penting untuk segera mendapat pemetjahannya.

Lebih lagi dalam waktu sekarang dimana kita harus dapat berdikari dalam segala bidang masalah pentjukupan bahan pangan umumnja dan bahan pangan jang mengandung protein hewani chususnja meminta perhatian kita jang sungguh untuk memetjakkannya.

Sesungguhnya melihat potensi kita jang tjukup dalam produksi bahan pangan jang mengandung protein hewani umumnja dan produksi daging chususnja, adanja industrialisasi dan semakin madjunja pengetahuan masjarakat tentang nutrition..... merupakan dorongan atau memberikan effect pada perkembangan dan kemandjuan usaha peternakan dinegara kita.

Sekarang marilah kita tindjau sepintas lalu usaha peternakan hewan potong dinegara kita chusus dari sudut produksi dan marketing.

Produksi ternak potong.

Sampai dewasa ini pemeliharaan ternak potong dinegara kita belum diusahakan setjara luas atau diusahakan sungguh-sungguh setjara perusahaan berdasarkan pertimbangan ekonomis dan bertudjuan untuk memperoleh laba. Pemeliharaan ternak potong di Djawa pada umumnja merupakan usaha sampingan usaha pertanian rakjat.

Dan usaha pertanian inipun masih dilaksanakan dalam scale jang ketjil dan lebih merupakan pekerjaan tradisional daripada bidang pekerdjaan sebagai sesuatu Perusahaan.

Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanja response jang tjukup dari para petani dinegara kita terhadap adanja perubahan demand dan harga dari hasil pertanian misalnja djika terdjadi kenaikan demand dan harga dari hasil pertanian jang harus diexport para petani jang menghasilkan barang lain pada umumnja tidak ada kemauan untuk menghasilkan barang jang permintaan dari harga naik itu mereka seolah-olah setjara tradisional menggarap tanahnya untuk menghasilkan barang tertentu.

Keadaan demikian sesungguhnya bukan sadja terdapat pada usaha rakjat tani dengan kita tetapi djuga pada masjarakat tani dinegeri jang sudah maju; perekonomiannya sekalipun. Sebabnja selain dari pada para petani kurang well informed mengenai pemasaran dari hasil pertaniannya djuga dalam usaha pertanian setjara tehnik adalah sukar untuk shift dari product satu keproduct jang lainnja.

Demikian pula pemeliharaan ternak potong (sapi kerbau) seolah-olah merupakan tradisi untuk membantu usaha pertaniannya Petani jang memiliki ternak mau mendjual ternaknya dipasar meskipun harganya tinggi djika mereka memerlukan ternaknja untuk pertanian.

Diluar Djawa di N.T.T. dan N.T.B. dimana terdapat padang rumput jang luas dan tanahnya tjotjot buat perternakan memang kita menjaksikan adanja perternakan diusahakan setjara lebih besar. Tetapi pada umumnja usaha perternakan disanapun tidak didasarkan atas pertimbangan ekonomis, melainkan lebih merupakan usaha tradisional untuk mempertahankan social prestige misalnja merel jang memiliki ternak banjak dan gemuk-gemuk tidak mau mendjualnja untuk dikirim keluar daerah jang memerlukannya atau untuk dipotong karena memiliki ternak jang banjak dan gemuk itu merupakan kebanggaan sosial bagi mereka.

Keadaan demikian itu adalah menundjukkan produksi dari ternak potong hewan besar, pada umumnya sebagian ketjil dari para pemelihara ternak memang telah ada jang mengusahakannya berdasarkan pertimbangan ekonomis dan diantara mereka jang punya modal ada jang mengusahakan peternakannya dengan sistim paron, jaitu membeli ternak

untuk dipelihara oleh para petani dan dari hasil usahanya dibagi dua diantara petani yang memelihara dan yang mempunjai.

Tetapi selain dari pada usaha demikian itu djumlahnya ketjil, "scale"-njapun ketjil pula, sehingga jika dibandingkan dengan adanya trend kearah menaikkan konsumsi daging dan mengingat pula arus berkembangnja industrialisasi pada khususnya dan pembangunan ekonomi umumnja, tjara produksi ternak potong harus mulai sekarang disesuaikan dengan kebutuhan.

Kesimpulan dari tjara produksi ternak potong di negara kita ialah bahwa sampai dewasa ini kita belum penjaksikan adanya produktie centra dari ternak potong yang diusulkan setjara komersil dan berdasarkan pertimbangan ekonomis, seperti misalnya kita melihat adanya peternakan di negara yang sudah maju, dari daerah produksi mana kebutuhan daging di daerah lainnja dapat dengan mudah dan lantjar dipenuhi.

idang pengumpulan.

Seperti halnya dengan hasil pertanian lain yang didistribusikan dalam skala yang ketjil, fungsi pengumpulan (collecting) dalam proses marketing memegang peranan penting, demikian pula pengumpulan ternak potong langsung dari para petani merupakan usaha yang menentukan bagi para pedagang ternak yang ingin menjalarkan dengan memperoleh nilai jasa (keuntungan) yang lumayan.

Dalam pengumpulan babi potong ada tendensi monopoli daripada para tengkulak yang menampungnya dari para peternak dengan tjara pembajakan muka kepada para peternak.

Demikian pula dalam pendjualannya oleh tengkulak-tengkulak ada tendensi mereka ingin memonopolinya.

Memang benar bahwa didalam menjalarkan ternak potong sapi/kerbau petani dapat membawa ternak-nya dipasaran yang diadakan pada hari tertentu dimana mereka mendjual ternaknya dengan harga yang ditentukan oleh kekuatan pembeli dan pendjual (harga pasar) kita boleh menjatakan tidak ada tendensi kearah monopoli didalam penjaluran ternak, karena para pemilik ternak dapat dengan bebas mendjual ternak dipasar menurut harga yang sewajarnya, (harga pasar). Tetapi kenjataanja tidaklah demikian.

Apa yang dinamakan belantik² atau tukang petjut² yang berkeliaran dipasar ternak di Djawa Tengah/Jawa Timur misalnja sesungguhnya memegang monopoli dalam pendjualan ternak dipasar. Djika orang pedagang ternak mau membeli ternak dipasar dan tidak dapat berhubungan langsung dengan pemilik ternaknya tentu ia akan membelinja dari belantik² yang telah diberi kuasa oleh pemilik untuk mendjualnja. Dan belantik² inilah yang menguasai ternak dipasar, sehingga dapat menentukan harga pendjualan.

Usaha untuk menghilangkan praktek belantik yang merugikan itu telah dilakukan misalnja dengan tjara pelelangan.

Tetapi kenjataanja belantik tersebut tetap dapat menguasai ternak yang ada dipasar dengan memberikan penawaran yang tinggi djauh dari kemampuan pedagang lain. Dan mereka berani memberikan — tawaran yang paling tinggi karena djika ternak menderita kerugian mereka tidak mau membajar harga ternak sepenuhnya kepada pemilik ternak. Hal ini djuga disebabkan karena kesalahan para pemilik ternak sendiri jaitu untuk supaya ternak yang akan mereka djual kelihatan gemuk dan berat sebelum didjual terlebih dahulu diberi makan yang banyak bahkan tak segan² pula kedalam mulutnja dipompa air bertjampur lumpur.

Djadi sebagai balasan para belantik yang merasa dikelabui oleh para peternak, mereka tidak mau membajar penuh harga ternak yang telah disetujuija.

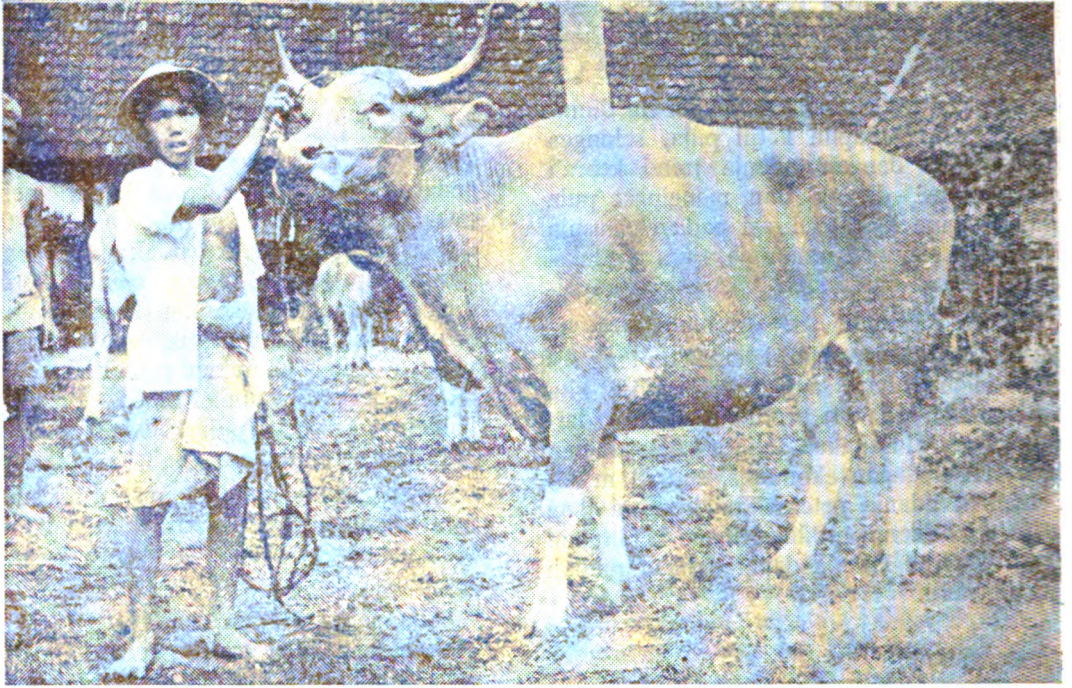
Adanya praktek belantik yang telah dikuasakan oleh para pemilik ternak, sebetulnja tidaklah dapat kita salahkan begitu sadja, karena pendjual ternak potong itu banyak sekali resikonja, dan adanya belantik itu sebenarnya adalah untuk membagi resiko yang besar diantara pemilik dan para belantik.

Para petani peternak harus menggiring ternak yang akan didjualnja kepasar ternak didekat kita. Ada kalanja petani yang djual tinggal dipedalaman biaja se-hari² menggiring ternaknja dari pasar kesatu pasar lainnja, djika pada pasar yang satu itu mereka tidak dapat mendjualnja dengan harga yang mereka kehendaki ini sudah terang harus mengeluarkan biaja yang banyak belum lagi resiko yang harus mereka pikul, djika ternaknja sakit/mati, tidak laku didjual penuh harus mengeluarkan yang lebih besar lagi.

Untuk menghilangkan sebagian resiko tersebut dan untuk mengurangi biaja yang mereka harus keluarkan, djika mereka sudah sampai menggiring ternaknja dipasar mereka mendjualnja kepada belantik dengan harga yang mereka kehendaki perdjandjian 50% dari djumlah pendjualannya diterimakan pada pemilik ternak, dan sisanja akan dibajar setelah ternak itu dapat didjual oleh belantik.

Djika didalam waktu yang telah ditentukan sibelantik belum dapat mendjual ternak maka pendjual ternak dari petani pada belantik mendjadi batal, sedang uang muka yang telah diterimakan kepada pemilik ternak tidak lagi dikembalikan pada sibelantik, maka demikianlah bila kita pergi kepasar ternak sebagian besar dari ternak yang ada dipasar ada ditangan para belantik dan kita lihat para pemiliknja enak duduk minum menunggu hasil pendjualannya.

Bentuk lain dari pada praktek belantik ialah adanya badan² yang berkedok koperasi yang memonopoli pembelian ternak didacrah produksi. Perdagangan ternak tidak diperkenankan membeli ternak langsung dari para peternak, demikian pula para peternak tidak diperkenankan mendjual ternaknja pada



Sapi djenis ekspor



orang tetapi harus melalui koperasi jang harga-
djuang lebih tinggi dari harga jang dibajarkan
da ternak.

Hak monopoli dari koperasi tersebut kadang² di-
gunakan.

bidang pengangkutan.

Seperti kita semua sudah maklum masalah peng-
angkutan dinegara kita sampai saat ini belum dapat
petjahkan seluruhnja, masih banjak hasil² pertanian
ng tertimbn didaerah produksi dan tidak dapat
lalurkan kedaerah konsumsi karena kesukaran
lam pengangkutan.

Bagi usaha pemasaran ternak potong jang me-
erlukan alat pengangkutan khusus dan tjara
ndling jang khusus pula kesulitan dalam pengang-
tan telah menimbulkan banjak pemborosan² jang
nambah biaja marketing.

Banjaknja ternak jang harus diangkut dan ter-
tasnja alat pengangkutan telah mengakibatkan
dagang berlomba-lomba untuk memperoleh alat
angkutan, dalam hal ini alat pengangkutan
eta api dan kapal. Keadaan demikian memberi
empatan kepada para petugas P.N.K.A. dan per-
tahaan pelajaran untuk menjalah gunakan aturan
ndjataan pemakaian alat pengangkutan untuk ke-
ntingan pribadinja. Bahkan menurut keterangan
ri pada pedagang ternak di Djawa Timur ada
tugas P.N.K.A. jang ikut mendjadikan gerbong
nak sebagai barang dagangan. Demikian pula
ngenai pengangkutan dengan kapal ada petugas
ng menjalah gunakan pendjataan kapal untuk
pentingan pribadinja.

Bertambahnja biaja marketing karena kesulitan
angkutan diantaranya berupa :

Bertambahnja biaja pemeliharaan selama ternak
menunggu alat pengangkutan.

Kesusutan dari berat hewan jang diangkut :

Biaja angkutan extra jang tidak resmi atau uang
smier jang diberikan pada petugas jang bekerdja
pada perusahaan angkutan dan kepada petugas
jang memeriksa lalu-lintas kendaraan.

Resiko kerugian karena adanya kemungkinan
turunnja harga ternak atau kematian ternak se-
telah sampai ditempat tudjuan jang diperhitun-
kan dalam kalkulasi harga pendjualan ternak.

Tidak adanya ketentuan mengenai waktu peng-
angkutan telah mengakibatkan pluhtuasi harga ter-
luar biasa baik didaerah produksi maupun di-
daerah konsumsi. Misalnja djika pengangkutan
ang kurang pedagang ternak segan untuk meng-
nakan pembelian didaerah produksi. Akibatnja
ga ternak didaerah produksi menurun tetapi se-
iknja didaerah konsumsi melondjak. Sebaliknja
ta alat pengangkutan kebetulan tjukup pedagang
lomba² untuk mengadakan pembelian didaerah
produksi dan harga didaerah produksi melondjak.

Sebaliknja didaerah konsumsi harga menurun.
nikian pula mengenai harga ternak jang akan
xport.

Bilamana tersedia kapal jang akan mengangkut
hewan keluar negeri, harga ternak didaerah pengiri-
man dapat melondjak luar biasa sehingga hal ini
mempengaruhi pula harga ternak untuk konsumsi
didalam negeri. Sebaliknja harga bisa menurun luar
biasa djika tidak ada kapal, jang akan membawa
hewan keluar negeri. Fluhtuasi biaja jang diakibat-
kan oleh tiada ketentuan mengenai pengangkutan ini
sukar untuk diikuti dan diperhitungkan sehingga
sering menimbulkan usaha jang spekulatif. Sering
terdjadi harga ternak didaerah konsumsi djauh lebih
rendah daripada harga ternak didaerah produksi
atau sebaliknja. Keadaan jang tidak wadjar ini tidak
lain karena tidak ada ketentuan mengenai waktu
pengangkutan.

Selain daripada kekurangan alat pengangkutan
jang telah mengakibatkan tidak lantjarnja the flow
of goods dan produksi kepada konsumsi tersebut
terdapat pula kesukaran jang diakibat oleh penja-
lah gunaan dari peraturan jang menentukan keluar
masuknja hewan dari daerah satu kedaerah lain.

Bidang penjaluran/distribusi.

Ternak potong disalurkan didaerah konsumsi
kepada djagal² jang memotong ternaknja untuk di-
djual dagingnja. Djika harga ternak didaerah pem-
belian ditentukan per ekor atas dasar taksiran berat
dagingnja jang akan diperoleh, maka harga pen-
djualan kepada djagal biasanja ditentukan per kg.
timbang hidup atau timbang mati.

Karena belum adanya Standardisasi dalam kualitas
dan penentuan harga maka hal ini telah membuka
kemungkinan untuk manipulasi didalam menimbang
hewan dan menentukan harga dan pula merupakan
bahan spekulasi dalam pemasaran ternak.

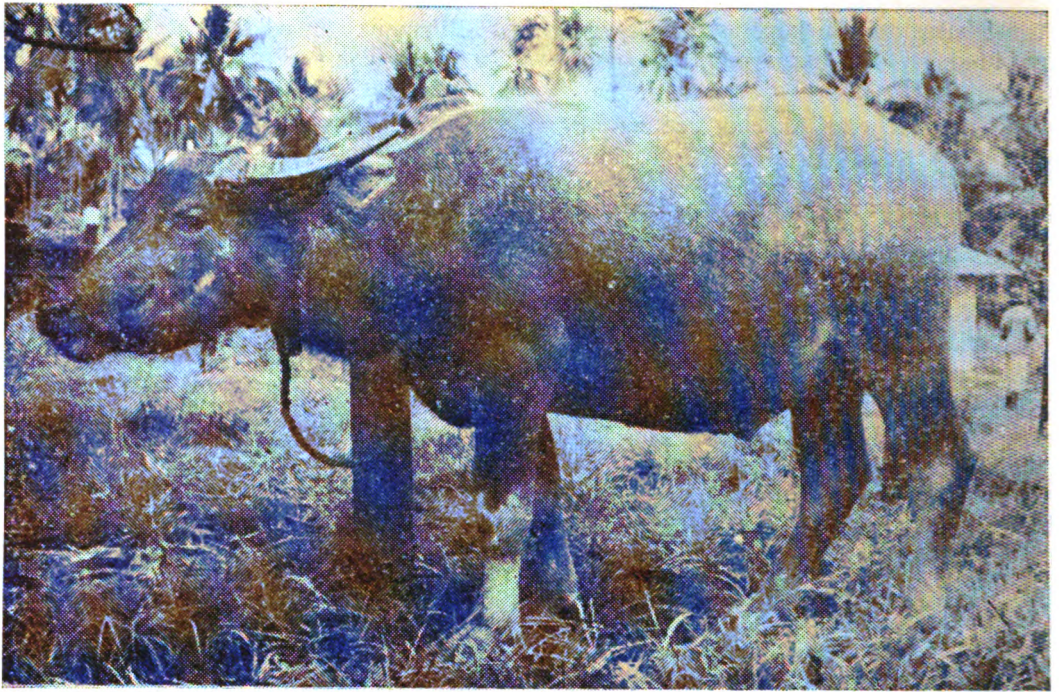
Seperti tadi telah dikemukakan harga ternak di-
daerah konsumsi sangat lebih karena tidak ada ke-
tentuan dalam pengangkutan. Adanja persaingan
jang tidak sehat diantara penjalur ternak potong
jang berusaha untuk memonopolisir pendjualan ter-
nak telah menambah pula ketidak stabilan harga
sehingga harga sukar untuk dikendalikan.

Kesulitan lain dalam bidang penjaluran ialah
kurang tjukupnja fasilitas untuk menampung hewan
sebelum hewan dipotong. Djika hewan jang akan
dipotong masih terlalu banjak sehingga tempat
penampungan tidak mentjukupi banjak hewan jang
terlantar mendjadi sakit atau susut terlalu banjak
dan untuk menghindarkan kerugian jang lebih besar,
karena harus mengeluarkan biaja pemeliharaan jang
lebih banjak, terpaksa terus didjual murah dibawah
harga pokok.

Sebagaimana didalam bidang pengumpulan belum
ada kerdjasama jang baik diantara pemilik ternak
atau belum ada organisasi pemasaran jang mendja-
min kepentingan prosedur maka dibidang distribusi-
pun belum ada suatu organisasi jang mengurus ke-
pentingan daerah konsumen.

Kesimpulan-kesimpulan.

Tidak adanya productie centra dari ternak potong



Kerbau djenis Ekspor

jang diusahakan setjara komersiil dan concentrred disatu fihak dan meningkatkannya kebutuhan daging jang tidak dapat dielakkan dilain fihak, telah menimbulkan kesulitan dilain pengumpulan (collecting) ternak potong dari produsen untuk disalurkan kepada konsumen.

Kurangnya pengetahuan petani² akan keadaan pasar, penyalahgunaan dari peraturan jang berlaku dan adanya perantaraan², baik berupa perorangan maupun badan² usaha jang berusaha untuk memonopolisir pengumpulan ternak potong, telah mengakibatkan kerugian pada para petani, karena harga ternak jang dibajarkan oleh para perantara pada para petani diauh lebih ketijil dari harga jang dibajar oleh para pedagang kepada perantara².

Kesukaran dalam pengangkutan telah menimbulkan tambahan biaya marketing jang sesungguhnya tidak diperlukan atau tidak produktif sehingga perbedaan harga ternak jang diterima oleh produsen dan harga jang dibajar oleh konsumen semakin lebih baniak dan baik produsen maupun konsumen dirugikan karenanja.

Tidak adanya ketentuan mengenai pengangkutan

djuga telah mempengaruhi harga ternak baik didaerah produksi maupun didaerah konsumsi jaitu terdjajnja fluh harga jang sukar untuk diikuti dan dipertungkan. Kurang tjukupnja fasilitas dalam pengumpulan hewan² sebelum dipotong harga jang ditentukan, adanya persaingan jang berusaha memopolisir pendjualan ternak didaerah konsumsi, dan tidak adanya penertiban dalam bidang distribusi telah menimbulkan pula kesukaran didalam bidang penjaluran.

Kesemuanja itu menundjukkan tidak adanya organisasi marketing jang baik jang menjabab usaha pemasaran ternak potong merupakan usaha spekulatif.

Maka untuk menghilangkan unsur spekulatif dalam pemasaran ternak potong perlu diadakan perbaikan baik didalam tjara organisasi dan teknik pemasarannja maupun dalam peraturan² jang bersangkutan dengan soal kehewanian sehingga pemasaran ternak potong dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

(Berita Ilmiah Anta

Prosedur Pelaksanaan Pemakaian Kredit atas Dasar Production Sharing untuk Marketable Goods (Consumer Goods)

Panitia Menteri Urusan Kredit Luar Negeri atas dasar Production Sharing, dengan pengumuman no. 04/PTPS/1965 tanggal 14 Oktober 1965, mengumumkan prosedur pelaksanaan pemakaian atas dasar production sharing untuk marketable goods (consumer goods) sebagai berikut :

Permohonan.

Berdasarkan suatu rentjana pembiayaan yang telah disetujui oleh Panitia Tehnis Production Sharing (P.T.P.S.), Panitia memberikan izin serta menentukan waktu pengimporan dari marketable goods kepada peserta Indonesia.

Djenis barang² yang boleh diimport, ditentukan oleh P.T.P.S. dengan memperhatikan pendapatan serta keinginan dari Direktorat Import/Departemen Perdagangan Luar Negeri.

Pelaksanaan.

Peserta Indonesia mengajukan purchase order kepada P.T.P.S. untuk kemudian diteruskan kepada B.L.L.D. Devisi Import untuk dimintakan persetujuan atas harganya. Purchase order yang telah disetujui B.L.L.D. oleh P.T.P.S. dikirim kepada peserta diluar negeri.

Peserta luar negeri mengirimkan dokumen² melalui banknya kepada Bank Negara Indonesia, Djakarta.

Bank Negara Indonesia membubuhi stempel P.S. atas dokumen² ini, untuk kemudian diserahkan kepada peserta Indonesia yang diterima.

Atas dasar dokumen², peserta Indonesia membuat K.P.P. untuk kemudian dimintakan persetujuan.

6. Bank Negara Indonesia memberi stempel P.S. atas dasar K.P.P. ini.

III. Pendjualan.

1. Pendjualan dari marketable goods dilakukan dengan tjara pelelangan.
2. Pelelangan ini diurus oleh P.T.P.S. diperkuat oleh wakil² instansi yang berhubungan langsung dengan tugas pemasaran.
3. Dalam djangka waktu 2 minggu setelah pelelangan dilaksanakan, uang hasil pelelangan harus sudah dimasukkan dalam rekening atas nama peserta Indonesia di Bank Negara Indonesia unit I.

IV. Penggunaan uang.

1. Peserta Indonesia dapat mengambil uang dari rekening untuk keperluan projek setjara bebas dengan memberitahukan kepada Kompartimen/Departemen yang bersangkutan (atas dasar planning yang disetujui P.T.P.S.).
2. Meskipun demikian P.T.P.S. setiap waktu dapat mengadakan penelitian terhadap penggunaannya dan meminta pertanggungjawaban kepada peserta Indonesia bersangkutan.

Djakarta, 14 Oktober 1965.

a.n. KETUA PANITYA MENTERI URUSAN
KREDIT LUAR NEGERI ATAS DASAR
PRODUCTION SHARING.

t. t. d.

(ACHMAD PONSEN)

Sekretaris Panitia Menteri Production Sharing



P. T. I N D O P L A N O

Kebon Sirih no. 33 (pav.) — Djakarta II/1
Tilpon : 42796

AGEN :

KRUPP, Djerman Barat.

— untuk lokomotip²-diesel, alat²-besi dan kontruksi bangunan dan pabrik²

CUMMINS ENGINE COMPANY, U.S.A.

— untuk segala djenis mesin²/motor²-diesel, power-units, diesel-generators, marine-diesel dan bus²

TALBOT WAGONFABRIK, Djerman Barat.

— untuk gerbong² kereta-api

KNORR BREMSE, Djerman Barat.

— untuk segala djenis rem kereta-api dan kendaraan bermotor

THE DE HAVILAND AIRCRAFT OF CANADA LTD.,
Canada

— untuk segala djenis — untuk segala djenis pesawat²-udara

BELL HELICOPTER COMPANY, U.S.A.

— untuk segala djenis pesawat² Helicopter

LYCOMING, U.S.A.

— untuk segala djenis mesin²/motor² pesawat² udara

LINK BELT SPEEDER CORP., U.S.A.

— untuk segala djenis alat²-besar

MENJELENGGARAKAN :

import-export, perdagangan-umum, industri, antara lain :

P.T. INDOPLANO, Pasar Minggu

— untuk industri potlot

P.T. DWIKA, Tegal

— untuk mesin² dan pengetjoran logam, pompa²-air, pompa²-lumpur dll.

Varia berita singkat:

Ekonomi/Perdagangan Dalam Negeri

BERDIKARI BUKAN BERARTI MENGURUNG DIRI.

Berdikari bukanlah berarti bangsa Indonesia ingin mengurung diri sendiri dan memutuskan hubungan dengan bangsa² lain. Tetapi sebaliknya, prinsip itu menghendaki perkembangan hubungan dengan dunia luar atas dasar persamaan, saling menghormati dan saling menguntungkan.

Bangsa Indonesia pada waktu ini sedang mau menjelesaikan revolusi pantjamuka : politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan revolusi dari peribadian Manusia Indonesia sendiri. Jaitu suatu revolusi jang bertudjuan untuk mentjapai masyarakat adil dan makmur dan untuk membanjarkan kembali suatu dunia baru jang bebas dari penghisapan manusia atas manusia dan bangsa-bangsa. Demikian a.l. penegasan Presiden Sukarno waktu menerima surat kepertjajaan Duns Swiss Jean Revilliod.

CONEFO DAN BERDIKARI

Perusahaan² Republik Federasi Djerman (Djerman Barat) ikutserta menjerahkan barang² untuk Projek Conefo. Diantara barang² tersebut ialah sistim tilpon dan teleks untuk Projek CONEFO jang keseluruhannja berasal dari Djerman Barat.

Menjinggung soal hubungan dagang antara F.D. dengan Indonesia, dikatakan bahwa hubungan dagang tersebut didasarkan atas saling menguntungkan dan tidak ada ikatan politik, serhubungan tersebut tjotjok untuk Indonesia jang sedang mendjalankan prinsip BERDIKARI.

Mengenai ekspor Indonesia ke Djerman Barat dikatakan akan lebih tinggi kalau pendjualan tembakau di Bremen diperhitungkan. Pelelangan tahunan tembakau Indonesia berdjumlah kira-kira 10.000 bal tembakau Sumatera dan Djawa jang pergerakannja meliputi hampir 150 djuta DM.

Di Indonesia sendiri Djerman Barat membebankan djasan² dalam pembayaran lalu lintas udara dan udara sedjumlah 27 djuta DM.

HASIL-HASIL MUBESAN I SEBAGAI LANDASAN BERDIKARI DIBIDANG SANDANG

Dengan Keputusan Presiden R.I. No. 299 tahun 1965 telah ditetapkan bahwa hasil-hasil Mesjawahar Besar Sandang (MUBESAN) I adalah sangat positif dan tjukup untuk dipakai seba-

gai landasan guna mentjapai BERDIKARI dalam bidang sandang.

Menjebar Doktrin "BINA KAWATJA KER-TA RAHARDJA" se-luas²nja sehingga mendjadi milik rakjat untuk dipakai sebagai pedoman dalam menudju BERDIKARI bidang Sandang.

Djuga dalam Keputusan Presiden R.I. tsb. ditetapkan pelaksanaan target 8 (delapan) meter tekstil per kapita jang harus ditjapai pada akhir tahun 1968.

Seluruh aparatatur Negara disemua tingkatan memban²tu dan mendjamin pengamanan pelaksanaan keputusan² tersebut.

4. PENGAPALAN BARANG² EKSPOR-IMPOR DI PELABUHAN MAKASAR

Volume perdagangan luar negeri melalui pelabuhan Makasar selama bulan September 1965 berdjumlah 9.830 ton, jang terdiri dari impor sebanyak 7.576 ton dan ekspor sebanyak 2.254 ton. Barang² ekspor jang terbanjak ialah rotan jang djumlahnja meliputi 874 ton dan diantara 6 negara pengimpor (tudjuan) jang terbesar adalah ke Eropa.

Sebagian besar pengapalan barang² ekspor tersebut dilakukan oleh 3 buah kapal samudra Nasional dari FN Djakarta Lloyd dengan djumlah angkutan 895 ton sedangkan sisanja oleh kapal² Samudra asing jang dilajani oleh PT. Gesuri Lloyd dan PT. Samudra Indonesia.

Barang² impor sebagian besar terdiri dari semen dan sebagian barang² untuk projek gula Bone, plywood dan sebagian ketjil general cargo jang kesemuannja berasal dari Eropa, Djepang, R.R.T. dan Hongkong. Pengapalannja dilakukan oleh 6 buah kapal² asing dengan djumlah angkutan 5.251 ton dan sisanja diangkut dengan kapal nasional PN. Djakarta Lloyd.

5. EKSPOR HASIL² PERTANIAN DARI DAERAH DJAWA TENGAH

Menurut tjatatan Dinas Pertanian Rakjat Daerah Djawa Tengah, ekspor dari daerah ini termasuk jang dihasilkan oleh PPN untuk tahun 1964 berdjumlah Rp. 1.416 djuta.

Barang² ekspor hasil pertanian jang banjak menghasilkan nilai rupiahnja jaitu: tembakau (480 djuta rupiah), karet (376 djuta rupiah), kopi (121 djuta rupiah), kapok (82 djuta rupiah), bidji kapok (Rp. 60 djuta), vanili 53 djuta rupiah, dlsb.

Disamping itu telah diekspor pula daun²an untuk obat, djahe, temulawak, kapulogo dan kumis kutjing serta serabut kelapa.

6. PRODUKSI KOPI DJAWA TENGAH MELEWATI TARGET

Oleh Inspektur Inspektorat Perkebunan Djateng diterangkan bahwa produksi perkebunan di daerah Djawa Tengah tahun ini memberi harapan baik, a.l. tanaman kopi jang telah memberikan produksi lebih daripada target jang telah ditentukan. Produksi l.k. 800 (delapan ratus) ton, sedangkan targetnja hanja 750 ton.

7. 40% POHON KELAPA DI SULAWESI UTARA SUDAH PERLU SEGERA DIREMADJAKAN.

Dewasa ini lebih kurang 40% pohon² kelapa di Daerah Tingkat I Sulawesi Utara telah sangat tua, sehingga dichawatirkan dalam waktu beberapa tahun lagi produksi kopra di Sulawesi Utara akan merosot sekali.

Untuk mengatasi hal² jang tak diinginkan, maka satu²nja djalan jang perlu segera ditempuh ialah **tindakan peremadjaan tanaman kelapa.**

Sekitar tahun 1950 produksi kopra Sulawesi Utara berkisar sampai 17.000 ton per bulan. Berhubung dengan belum adanya tindakan peremadjaan sampai saat ini (1965) produksi merosot sekali hingga tinggal berkisar pada 10.000 ton per bulan.

8. KEISTIMEWAAN TJOKLAT INDONESIA.

Tjoklat Indonesia sangat digemari oleh luar negeri, sehingga merupakan hasil ekspor jang baik buat negara kita.

Keistimewaannya terletak pada aroma jang tidak dipunyai oleh negara² Afrika, dan aroma Tjoklat Indonesia sudah dikenal oleh negara² lain serta dalam pasaran dunia.

Tetapi belakangan ini tanaman tjoklat di Djawa Tengah berkurang produksinja antara 25 sampai 30% dari seluruh produksi jang ada pada PPN Aneka Tanaman XI Djawa Tengah, karena serangan hama "mot" demikian a.l. Direktur PN Antan XI Djawa Tengah.

9. LOMBOK (TJABE) KEDU SELATAN SEBAGAI BAHAN EKSPOR

Daerah Kedu Selatan jang terkenal dengan hasil lomboknja (Tjabe), tahun ini mengalami panen jang berlimpah² terutama di Butuh dan Kutoardjo. Pedagang² dari luar daerah banjak

jang datang ke-plosok² desa dengan membawa angkutan sendiri dan memborong hampir seluruh hasil daerah itu.

Menurut keterangan, lombok (tjabe) ini oleh pedagang² kemudian dikeringkan untuk selanjutnja diekspor ke luar negeri.

10. TANAMAN TJENGKEH DI DAERAH POSO (SULAWESI TENGAH)

Sedjak beberapa tahun terachir ini, masyarakat petani didaerah Poso telah banjak sekali memberikan perhatiannja terhadap penanaman pohon tjengkeh. Penanaman ini dimulai sedjak tahun 1960 dan hingga kini telah mentjapai ratusan ribu pohon.

Menurut keterangan, penanaman pohon tjengkeh tersebut mulanja dipelopori oleh Djawatan Pertanian Poso, jang pada tahun 1960 mulai mengadakan pembibitan dengan djumlah pohon. Sampai pada tahun 1964 Djawatan Pertanian telah berhasil mendrop sedjumlah bibit tjengkeh, masing² untuk daerah Tentena (sekitar Danau Poso) 40.000 pohon, Ampana 10.000 pohon dan Tagolu 25.000 pohon.

Dalam hubungan ini, menurut taksiran Djawatan Pertanian setempat bahwa 5 @ 6 tahun jang akan datang ini, daerah Poso akan merupakan Sonder (Minahasa) kedua dalam penghasilan tjengkeh.

11. TANAMAN SUBA DAPAT DJUGA MENHASILKAN MADU

Tanaman suba, suatu pengganti beras dapat juga menghasilkan madu bagi penanamnja. S tiap hektar tanaman suba akan dapat menghasilkan sedikitnja 50 kg madu lebah.

Tjaranja, ialah begitu suba jang hanja berumur 70 hari itu ditanam, begitu pula tjepat² k pelihara lebah² (tawon) sekitar tanaman tersebut. Dengan demikian, pemeliharaan lebah akan memberikan 2 matjam hasil. Pertama p njerbukan pada bunga² suba lebih sempurna, d madu dari lebah itu sendiri akan dapat dimanfaatkan oleh penanamnja, demikian antara l Basuki, Pimpinan Pilot Projek Suba.

12. PEMEGANG KUASA BNI UNTUK EROPA

Direktur Bank Negara Indonesia S. SUPA TO S.H. telah diangkat sebagai Pemegang Kuasa B.N.I. untuk Eropa di Amsterdam, menggantikan GANDASUBRATA S.H. jang tadinja memegang jabatan Pemegang Kuasa tsb. disamping mendjabat sebagai Direktur N.V. Indonesische Overzeese Bank.

(Antar

Pengumuman² Departemen Perdagangan Dalam Negeri/ Urusan Perdagangan Luar Negeri

PILOT PROJECT PERTEMBAKAUAN.

Untuk melaksanakan sebaik-baiknya pilot projek bidang pertembakauan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri/Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Menteri Perkebunan tanggal 19 Djuni 1965 No. 099/6/MPLN/SKB/65, SK/85/Men. Perk/65 sehingga betul² dapat mengembangkan perdagangan tembakau sebagaimana mestinya, maka dengan Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 0161/10/MPLN/SK tanggal 25 Oktober 1965 ditetapkan B.P.U.-P.N.N. bersama-sama Gading Mas ditunduk sebagai pelaksana dari pilot projek dibidang pertembakauan.

KERDJASAMA DIBIDANG PERTEMBAKAUAN ANTARA B.P.U.-P.P.N. DAN PILOT PROJECT PERTEMBAKAUAN.

Untuk melaksanakan amanat P.J.M. Presiden/mimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. "berdiri diatas kaki sendiri" dibidang perekonomian demi memperkuat front terdepan dalam menghadapi konsumen tembakau dipasar internasional, sehingga betul² leading and commanding position dalam perdagangan tembakau dapat diperkembangkan dan pertahankan serta usaha² pengintegrasian perdagangan tembakau yang terarah dapat dilaksanakan sebaik²nja perlu diadakan kerdjasama yang erat-eratnja antara B.P.U.-P.P.N. dengan Pilot Project Pertembakauan.

Dengan Keputusan Bersama Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Menteri Perkebunan No. 0162/10/MPLN/SKB/65, SK/139/Men. Perk/65 tanggal 25 Oktober 1965 telah ditetapkan kerdjasama antara Pilot Project Pertembakauan dan B.P.U.-P.P.N.

Pilot Project Pertembakauan dan B.P.U.-P.P.N. bersama-sama mengusahakan tjara yang sebaik²nja (dalam perdagangan) bagi perdagangan tembakau supaya sumnja baik yang mengenai pembelian/pendjualan maupun yang menjangkut perbaikan mutu khususnya dengan menjelaskannya kepada kenjataan dan pelaksanaan praktis.

Pilot Project Pertembakauan dan B.P.U.-P.P.N. melaksanakan bersama-sama hal tersebut diatas sehingga commanding and leading position dalam perdagangan tembakau betul² dapat diperkembangkan dan dipertahankan sebaik²nja.

Pilot Project Pertembakauan dan B.P.U.-P.P.N. bertanggungjawabkan segala aktivitas dan

lain²nja kepada Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Menteri Perkebunan.

3. PRODUSEN EKSPORTIR TEMBAKAU.

Dalam rangka penertiban bidang pertembakauan untuk mengsucceskan BERDIKARI dianggap perlu menjempurnakan peraturan²/ketentuan² tentang syarat² yang harus dipenuhi oleh Produsen-Eksportir

Dengan Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri tanggal 25 Oktober 1965 No. 0164/10/MPLN/SK/65 telah ditetapkan peraturan tentang syarat² yang harus dipenuhi untuk dapat diakui sebagai produsen-eksportir tembakau.

Untuk dapat diakui sebagai Produsen-Eksportir Tembakau, harus dipenuhi syarat²:

- a) mempunyai angka Pengenal Ekspor (APE) Umum;
- b) memiliki sendiri sekurang²nja: gudang fermentasi/pengepakan sekurang²nja 1.500 m² dan ontsmetkamer, yang kesemuanya memenuhi syarat² yang ditentukan oleh Lembaga Tembakau;
- c) mengolah dan mengekspor sendiri tembakau yang dihasilkan oleh perusahaannya;
- d) mempunyai tenaga ahli pertembakauan yang tetap.

Chusus bagi Eksportir²-Produsen Tembakau yang mengekspor tembakau Djawa, disamping syarat² tersebut, diharuskan setiap tahunnja mengekspor sekurang²nja 1.500 bal @ 100 kg baik atas dasar konsinjasi maupun L/C, ketentuan mana mulai berlaku tanggal 1 Djanuari 1966.

Produsen-Eksportir Tembakau harus mengekspor hasil perusahaannya sendiri dan ia tidak diizinkan membeli/mengekspor tembakau berupa "Ready-bale" yang dihasilkan oleh pengusaha² atau pengolah² tembakau lainnja.

Pelanggaran terhadap syarat² tersebut diatas dapat mengakibatkan ditjebutnja Pengakuan sebagai Produsen-Eksportir Tembakau.

Eksportir Tembakau yang pada waktu mulai berlakunya Keputusan ini telah diakui sebagai "produsen-Eksportir Tembakau" tetapi belum memenuhi syarat² tersebut diatas, diberikan kesempatan untuk memenuhi syarat tersebut sampai dengan tanggal 30 Djuni 1966. Apabila mulai tanggal 1 Djuli 1966 syarat² tersebut belum dipenuhi, maka pengakuannya sebagai "Produsen-Eksportir Tembakau" dengan sendirinya tidak berlaku lagi/ditjabut.

Kepada pemilik² tembakau "read-bale" jang bukan Produsen-Eksportir Tembakau, diharuskan mengekspor tembakaunja melalui Produsen-Eksportir Tembakau lainnja.

4. KETENTUAN² MENGENAI PENDJUALAN TEMBAKAU KE LUAR NEGERI.

Dalam pelaksanaan pemasaran tembakau Indonesia di luar negeri, dengan Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 0165/10/MPLN/SK/65 tanggal 25 Oktober 1965 telah ditetapkan ketentuan² mengenai pendjualan tembakau keluar negeri.

Jang diizinkan untuk mengekspor tembakau hanjalah produsen-eksportir tembakau sesuai dengan Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 0164/MPLN/SK/65 tanggal 25 Oktober (tersebut diatas No. 4).

Semua pendjualan tembakau keluar negeri oleh P.N.N. dan Swasta pada umumnja harus dilakukan atas dasar konsinjasi dan disalurkan melalui TEMINDO GmbH di Bremen.

Disamping itu pendjualan tembakau ke luarnegeri seperti tersebut diatas, dimungkinkan djuga pendjualan atas dasar L/C, dengan ketentuan² sebagai berikut:

- a. Para eksportir jang hendak mengekspor tembakaunja atas dasar L/C, harus mengadjukan permintaannja kepada Direktorat Ekspor Pusat, disertai rekomendasi dari TEMINDO GmbH;
- b. TEMINDO GmbH memberikan rekomendasi atas permintaan tersebut kepada Direktorat Ekspor, dengan berpedoman bahwa harga jang akan diperoleh dengan ekspor atas dasar L/C itu sekurang²nja adalah harga jang dapat ditjapai dalam pelelangan di Bremen;
- c. Untuk ekspor atas dasar L/C diketjualikan tembakau Sumatera dan Besuki N.O.

Demikian a.l. Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri.

5. MUTASI/PERSONALIA DEPPERDAG.

- a. Nursjiwan Azis S.H. — Kepala Seksi I Bagian Khusus Sekum L.N.
- b. Djamaluddin Thahir S.H. — Kepala Seksi II Bagian Khusus Sekum L.N.
- c. R.I. Suwardji — Kepala Seksi Commodities Bagian Kerdja sama Antar negara DHPLN.
- d. A. SAJOETI — Kepala Bagian Inspeksi Daerah merangkap Kepala Seksi Sulawesi/Maluku-Irian Barat dan Sabang. (Direktorat Ekspor).
- e. K.M. Badaruddin — Kepala Seksi Bali/Nusatenggara Barat/Nusatenggara Timur Bag. Inspeksi Daerah Direktorat Ekspor.

- f. A.N. Perpatih — Kepala Seksi Djawa Bagian Insp. Daerah DEK.
- g. Aboenawas Moeljan — Kepala Seksi Sumatera Bag. Insp. Daerah DEK.
- h. St. Mohammad Sidin — Kepala Seksi Kalimantan Bag. Insp. Daerah DEK.

6. LEMBAGA PENJALURAN PERDAGANGAN (L.P.P.).

- a. J.A.H. GONI, Wakil Kepala Direktorat Pengadaan dan Penjaluran — **Direktur**.
- b. E.R. WAKARY, Wakil Kepala Direktorat Marketing dan Research — **Wakil Direktur**.
- c. M. SAPARI, dari Direktorat Administrasi — **Wakil Direktur II**.

Anggota² Badan Pengawas L.P.P.:

- a. Kepala Direktorat Pengadaan dan Penjaluran merangkap Ketua;
- a. Kepala Direktorat Marketing dan Research
- c. Kepala Direktorat Administrasi.

Alamat kantor L.P.P. telah dipindahkan dari Kalibesar Timur 5/7 Djakarta-Kota ke **Djl. Tanah Abang Timur 87, Telp. 48734, Djakarta.**

Berhubung dengan hal tsb. diatas, maka S.P. surat² dsb. untuk L.P.P. hendaknja disampaikan kepada alamat tersebut atau **TROMOLPOS No. 11/DKT, Djakarta.**

Rekening L.P.P. telah dipindahkan ke Bank Negara Indonesia Unit III Tjabung Utama Djakarta dengan rekening giro No. 7237. Rekening lama pada B.K.T.N. (B.N.I. Unit II) tidak dipergunakan lagi.

7. MENTERI BRIGDJEN A. JUSUF KELUAR NEGERI.

Atas instruksi P.J.M. Presiden, Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri BRIGDJEN ACHMAD JUSUF telah berangkat keluar negeri dalam rangka konsolidasi Perusahaan Niaga Negara diluar negeri mendjelang penutupan tahun 1965 dan sebagai KEPALA STAF KOTARI untuk menentukan policy impor dan ekspor tahun 1965 dalam rangka BERDIKARI.

Jang bertindak sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri Ad Interim telah ditetapkan Menteri Perdagangan Ringan BRIGDJEN MOHAMMAD JUSUF.

Dengan keberangkatan Kepala Staf KOTARI Menteri BRIGDJEN A. JUSUF keluar negeri, maka Menteri BRIGDJEN M. JUSUF mendjabat djalur Pd. Kepala Staf KOTARI.

P. N. DHARMA NIAGA

MPOR : Mesin² untuk Pertjetakan — Industri — Pertanian — Perkebunan — Tekstil.

Mesin² Perkakas — Pendingin — Minjak Kelapa — Pompa² dan Mesin untuk Pembangunan.

Alat² Besar — Kereta Api — Mesin² Pertambangan Clark Forklifts. Mesin² DIESEL/Generating set — Alat² RADIO/elektronik/Telekomunikasi dan motor² listrik.

ERDAGANGAN UMUM : Dalam Negeri/Antar Pulau.

INSTALASI : Telepon dan listrik dengan tenaga² Ahli.

PERBENGGKELAN : Service dan pemasangan mesin.

Kantor Pusat :

Djalan Tanah Abang Barat 6 - 8 - 10 — Djakarta.
P.O. Box 2028 — Tel. 47557 - 47577 - 49978 - 41974
Telex 292

Kantor Tjabang Djakarta

Djalan Djembatan Batu 50 — Tel. 22041 - 22042 - 22043 - 22044
Djakarta Kota.

Tjabang-Tjabang :

BANDUNG — SEMARANG — SURABAJA — MEDAN —
PONTIANAK — PALEMBANG — TJIREBON — JOGJA-
KARTA — MALANG — DJEMBER — BANDJARMASIN —
MAKASSAR — MENADO — AMBON — DENPASAR —
BANDA ATJEH — PADANG dan PAKANBARU.

Adjaran² Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno

VI.

Djerit-Kege mparan

Soal djadjahan adalah soal rugi atau untung; soal ini bukanlah soal kesopanan atau soal kewadjan; soal ini ialah soal mentjari hidup, soal **business**.

Semua teori² tentang soal-djadjahan, baik jang mengatakan bahwa pendjadjah itu terdjadinja ialah oleh karena rakjat jang mendjadjah itu ingin' melihat negeri asing, maupun jang mengatakan bahwa rakjat pertuanan itu hanja ingin mendapat kemasjhuran sahadja, baik jang mengatakan bahwa rakjat pertuanan itu mendjadjah negeri lain ialah oleh karena negerinja sendiri lantaran banjaknja penduduk hingga terlalu sesak, maupun jang mengatakan bahwa pendjadjahan itu diadakannja ialah untuk menjebar kesopanan, — semua teori² itu tak dapat mempertahankan diri terhadap kebenaran teori jang mengadjarkan, bahwa soal djadjahan ialah soal **r e z e k i**, soal jang berdasar **e k o n o m i**, soal mentjari **k e h i d u p a n**.

Tak ketjil kerugian ekonomi Inggeris, bilamana Mesir atau Italia dapat memerdekakan diri; tak sedikitlah kerugian rezeki Perantjis dan Amerika, bilamana Indo-China dan Philipina bisa mendjadi bebas; tak ternilailah kerugian jang diderita oleh negeri Belanda, bilamana bendera Indonesia Merdeka bisa berkibar-kibar ditanah air kita, sebagaimana Jhr. Dr. Sanberg mengatakan dengan ia punja kata² "Indie verloren, rampspoed geboren"; — tak terhinggalah bentjana jang menimpa benua Eropah, bilamana benua Asia bisa menurunkan beban imperialisme asing dari pada pundaknja, — hal ini tjukuplah dibuktikan oleh pudjangga², diplomat² dan djuru² pengarang Eropah dan Asia dengan setjukup-tjukupnja angka dan seteliti-setelitinja hitungan Negeri djadjahan adalah suatu **s j a r a t** bagi hidupnja negeri² pertuanan, suatu sjarat jang untuk negeri pertuanan jang ketjil ada maha-besar dan maha-tinggi kepentingannja, dan karenanja harus dan mesti dipegang teguh², diikat erat² olehnja, djangan sampai terlepas.

Karena itu, maka soal djadjahan itu pada kekatnja bukanlah soal hak; ia soal kekuasaan, ia soal **m a c h t**.

Ukuran jang dipakai oleh fihak jang bu akan pentjaharian rezeki itu tentang baik a djeleknja sesuatu keadaan dalam negeri djadjahannja, tentang "boleh" atau "tidak boleh" sesuatu faham, sesuatu sikap, sesuatu tudju atau sesuatu gerakan, banjaklah ukuran kepentingannja kaum itu sahadja adanja. Semua keadaan dalam negeri djadjahan jang bertentangan dengan kepentingannja fihak itu, jang merugikan akan kepentingannja pihak itu, segeralah mendapat perlawanan dari padanja. Riwayat djadjahan penuhlah dengan tjontoh², dim fihak itu kadang² meninggalkan semua lapar keadilan, menjalahi semua hukum²nja menghina semua rasa-kemanusiaan, — bilan kepentingannja terlanggar dan usahanja mentjari rezeki terganggu.

Kita insjaf akan hal ini. Kita mengetahui bahwa bukan sahadja kaum komunis, jang ngobarkan udara pada bulan Nopember dan Djanuari 1927, jang mendapat perlawanan bukan sahadja kaum pengikutnja Lenin dan Trozky jang dituntut dan ditindas, — tetapi djuga kita, kaum nasionalis Indonesia dan saudara² kita jang bernaung dibawah bendera Islam; bukan sahadja kaum bolshevik tetapi djuga semua kaum, baik nasionalis, maupun Islamis maupun kaum jang berfaham sahadja, asal ingin dan berusaha buat dajanja Indonesia — Merdeka dengan seleka Perlawanan fihak itu terhadap pada madj pergerakan kita bukanlah perlawanan terhadap pada salah suatu faham, bukanlah perlawanan terhadap pada suatu adjaran, bukanlah perlawanan terhadap pada suatu "isme", akan perlawanannja ialah dihadapkan pada semua usaha bangsa kita jang menudju kepada Indonesia — Merdeka dengan tidak diperdulagi dasar apa, azas apa, atau "isme" apa terletak dibawah usaha itu adanja.

Kita insjaf akan hal ini sedari mulanja. Sebelum kaum komunis tersapu dari pergaulan umum, sebelum mereka itu di-Digulkan, maka mana-mana terdengarlah sembojan fihak sana yang berbunyi "lenjaplah komunisme". Akan tetapi sesudah beratus-ratus, beribu-ribu kaum mengikuti Lenin ini dibawa ketengah-tengah-tengah rimba dan rawa Papua, maka segeralah sembojan itu mendjelma mendjadi sembojan baru, sembojan "lenjaplah Pan-Islamisme", dan sembojan "lenjaplah nasionalisme Indonesia" — sembojan mana sekarang sudah mendjelma pula mendjadi suatu djerit-kegemparan, sebagaimana terbukti dengan bukunya professor Treub, buku yang bernama "Het gist in Indie".

Didalam buku ini hanjalah djerit-kegemparan yang terdengar. "In dit jongste geschrift van den voorzitter van den Ordernemersraad wordt een alarm geslagen", begitulah "Indische Week" menulis. Treub hanjalah mendjerit; ia hanjalah memukul kentongan. Ia tidak mentjari sebabnya komunisme mendjadi subur; ia tidak mentjari sebabnya gerakan Pan Islamisme bertambah-tambah pengikutnja; ia tidak mentjari sebabnya faham kita, faham nasionalisme — Indonesia makin lama makin masuk kemana-mana hanja menuntut penindasannya komunisme, nasionalisme dan "Indonesisch nationalisme" sahaja. Ia tak mau ingat, bahwa ia sendirilah yang menggerakkan ia punja aksi dalam tahun 1923, ikut menambah pahit dan getirnja hidupnya rakjat yang pergerakannya kini ia kentongi itu. Ia tak menulis sepatah kata atas bezuimiging, penghebatan, yang melemparkan beribu-ribu manusia atas djalan, memasukkan demit kelaparan di dalam ribuan rumah tangga. Ia tak menjebutbutkan tambah beratnja belasting diatas punggung rakjat, pada saat yang pentjaharian rezeda segetirnja. Ia tak mengutjap-ngutjapkan bagaimana hak bervergadering dibatasi atau ditjajut, bagaimana berpuluh-puluh pemimpin pergerakan ditahan, dibui, atau dibuang sehingga pergerakan itu mendjadi lebih panas dan lebih sengit karenanja. Pendek kata ia tak menjebutkan sebab-sebabnja kini lautan pergerakan Indonesia ada mendidih; ia hanja memukul kentongan; ia hanja mengeluarkan djerit-kegemparan sahaja, yang memang terhad pada semua "isme", — "isme" apapun dju — yang mengandung azas mentjari kebebasan dan kemerdekaan dengan djalan yang lekas dan gampang, semuanya mendapat lagi bukti kenjataanja dengan djerit-kegemparanja professor Treub. Komunisme harus disapu, Islamisme dan nasionalisme Indonesia d j u g a harus disapu! Sebab "komunisme, nasionalisme Indonesia dan Islamisme adalah bergandengan satu sama lain, dan mengisi satu sama lain", — dan semua aksi, yang bermaksud mendatangkan

kemerdekaan Indonesia harus ditindas, „kalau perlu dengan kekerasan” „zo nodig met geweld”.

Kita bersenjum. Sudahkah begitu haibatnja kegemparan Treub dan fihaknja Treub, sehingga pengadjarannya riwayat, pengalaman riwayat djadjahan atas penindasan sesuatu pergerakan rakjat met geweld, tiada diindahkani lagi olehnya? Sudahkah begitu gemparnya kaum itu, melihat madjunja nasionalisme Indonesia, sampai mereka djuga memukul kentongan atas sikapnja setengah bupati, yang dikatakan "lahirnja setia pada pemerintahan, tetapi dalam batinnja menjetudjui pergerakan yang melewati batas ini"? Sudahkah begitu kagetnja kaum itu, sampai kaum Islam hendak djuga dilarangi oleh Treub memenuhi sesuatu rukunnja, hendak dilarangi pergi ke Mekkah, oleh karena hadzj kesana ialah "sudah mendjadi sesuatu bahaya bagi pemerintahannya tiap² negeri Keristen"?

Kita, kaum nasionalis Indonesia, memandang djerit-kegemparanja professor Treub itu, ketua dari perkumpulan kaum modal Belanda, sebagai suatu t a n d a. Djerit-kegemparan ini adalah suatu s y m p t o m (gedjala). Ia menandakan, bahwa memang benar² lawan kita ini merasa tanah bergojang dibawah kakinja. Ia menandakan, bahwa haluan yang diambil oleh kita, kaum nasionalis Indonesia, dan yang diambil oleh saudara² kita, kaum Pan — Islam, adalah haluan yang betul, haluan yang karenanja harus kita teruskan. Selama kaum yang berhadapan dengan kita mentjertja kita, memukul kentongan atas sikap kita, menuntut penindasan kita, — selama itu kita harus berdjalan terus. Baru djikalau sebaliknya kaum itu memudji dan membenarkan kita, menjetudjui kita, maka datanglah saatnja bagi kita berganti terdjang dan berganti djalan.

Sebab Treub sendiri sudahlah mengakuinja : perkara pergerakan Indonesia adalah perkara mati-hidupnja kehidupan fihaknja, perkara yang ia katakan "het gaat om ons bestaan". Ia, professor Mr. Treub, ketua kaum modal Belanda, dan professor Ir. Klopper, pemimpin pabrik² mesin Thomassen dinegeri Belanda, yang menjokong pula djerit-kegemparanja Treub dengan kata² "het eenvoudigste instinct van zelfbehoud drings ons om alles te doen, om de toestan in Insulinde baas te blijven", dua professor kaum modal Belanda ini haruslah insjaf, bahwa kita, kaum nasionalis Indonesia dan saudara² kita, kaum Pan — Islam, sama bergerak ialah d j u g a oleh dorongannya "het eenvoudigste instinct van zelfbehoud", d j u g a oleh karena "het gaat om ons bestaan"! Sebagaimana kekalnja pendjadjahan di Indonesia ada suatu perkara keselamatannya negeri Belanda, maka berhentinja pendjadjahan itu adalah pula suatu perkara keselamatan negeri Indonesia, keselamatan rakjat Indonesia, dari pendirian zelfbehoud, maka

fihak pertuanan adalah hak merintang, melawan dan menuntut tindakan pergerakan kita; akan tetapi terlitik dari pada pendirian zelfbehoud itu djuga, maka kita mempunyai djuga hak bergerak, hak berusaha mentjari kebebasan daja-upaja melepaskan diri dari keadaan sekarang ini, hak berusaha mentjari kebebasan. Hak mereka dalam hal ini adalah berhadap-hadapan, beradu dada, dengan hak kita semua; haknya reaksi adalah berhadap-hadapan dengan haknya aksi, dan soal berhadap-hadapannya hak dengan ini segeralah mendjadi soal kekuasaan berhadap-hadapan dengan kekuasaan pula, macht berhadap-hadapan dengan macht.

Karena itu, maka kita memandang djerit-kegemparanja Treub dan fihaknja Treub itu hanja sebagai suatu tanda sahaja. Kita tidak menjelidiki lebih djauh pantas atau tidaknya mereka mengeluarkan djerit kegemparan itu; kita tidak membantah, dan kita tidak memperotes; kita hanja mempeladjarinja. Sebab, sebagai jang sudah kita tuliskan diatas: Treub dan fihaknja Treub mempunjai hak memusuhi kita; het gaat om ons bestaan, sebagaimana pergerakan kita itu ialah buat keperluannya ons bestaan.

Dengan mempeladjadi semua tanda-tanda, memperhatikan semua symptoom², memperhatikan semua kekurangan² jang tampak pada fihaknja lawan, maka dapatlah kita mengetahui bagian² jang manakah dari barisannya fihak lawan itu ada lembek, dan dapatlah kita dengan gampang mentjari tempat² pengapesannya silawan itu, sehingga dengan banjak hasil bisa mengarahkan serangan kita pada tempat-tempat pengapesannya itu adanja. Akan tetapi sebaliknya, kita djuga harus mempeladjadi kekurangan² sendiri, memperhatikan kesalahan² sendiri agar supaja kita bisa mengetahui bagian² jang mana kita punja organisasi kurang teratur, — sehingga kita dengan gampang bisa memperbaiki kekuatannya barisan kita itu; membetulkan kesalahan² dan kekurangan² didalam kita punja organisasi itu; dan kalau perlu menjusun kembali organisasi kita itu mendjadi susunan jang kuat dan sentausa.

Treub dengan bukunja sudah memberi tanda itu. Ia menundjukkan pada kita dimana letaknya tempat² pengapesan fihaknja; ia menundjukkan, bahwa pergerakan kita, kaum nasionalis Indonesia, dan pergerakan saudara² kita, kaum Islam, adalah benar mengchawatirkan bagi kepentingannya, benar² terasa olehnja sebagai pe-

ngapesannya. Oleh karena itu, maka sebagai jang kita tuliskan diatas, kita berdjalan t r u s

Dalam pada itu apakah Treub dan fihaknja Treub betul² mempunjai sangkaan bahwa pergerakan kita, jang sebagai suatu usaha bangsa kita mentjari hidup jang lebih laju dan lebih sempurna, dengan kodratnja akan sudah timbul dari njawanya bangsa di rakjat kita, bisa padam atau dipadamkan? Apakah Treub dan fihaknja Treub bisa menundjukkan satu tjontoh dari riwayat-dunia, jang gerajanya njawa sesuatu Bangsa, terutama njawa Bangsa jang mentjari kemerdekaan, bisa mati atau dimatikan?

Tetapi memang sukarlah bagi kaum pertuanan mengambil sikap jang benar terhadap pada pergerakan jang dihadapinja. Pergerakan itu mada kalau tidak ditindas pergerakan itu djuga madju kalau ditindas.

Memang begitulah tragiknja kaum pertuanan

"Suluh Indonesia Muda", 1928



Djl. Bandengan Utara 89,
DJAKARTA-KOTA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

K O M A N D O

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA
REPUBLIK INDONESIA/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI

T E N T A N G

TINDAKAN PENGAMANAN REVOLUSI

Kami, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia,

Menjadi bahwa sebagai akibat daripada peristiwa apa jang dinamakan "Gerakan 30 September", telah timbul fakta-fakta dan gejala-gejala jang membahayakan dan mengantjam sendi-sendi kehidupan kenegaraan dibidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan jang akan berpengaruh pada peningkatan kesiap-siagaan baik mental maupun fisik dalam menghadapi musuh revolusi Nekolim, dalam rangka penjelesaian Revolusi;

Maka demi tertijptanja suasana tenang dan tenteram serta pulihnja keamanan dan ketertiban umum sebagai sjarat mutlak untuk mengamankan usaha-usaha mentjapai tudjuan Revolusi;

SAJA KOMANDOKAN KEPADA SEGENAP APARAT NEGARA BERSAMA-SAMA DENGAN SELURUH RAKJAT UNTUK :

1. Selalu membina kesatuan dan persatuan seluruh kekuatan Nasional Progressip Revolusioner atas dasar Pantja-AZIMAT REVOLUSI;
2. Menjinkirkan djauh-djauh tindakan-tindakan destruktif seperti RASIALISME, PEMBAKARAN-PEMBAKARAN DAN PENGRUSAKAN-PENGRUSAKAN;
3. Menjinkirkan djauh-djauh fitnahan-fitnahan dan tindakan-tindakan atas dasar perasaan balas dendam;
4. Melarang semua DEMONSTRASI-DEMONSTRASI jang tidak terlebih dahulu mendapat idzin dari jang berwadjib;
5. Terus meningkatkan aksi-aksi massa jang Revolusioner setjara konstruktif dan dengan disiplin Nasional jang tinggi **DALAM MENGHADAPI NEKOLIM DAN SEGALA SIASAT SUBVERSINJA.**

semoga TUHAN JANG MAHA ESA melimpahkan taufik dan hidajatnja kepada kita sekalian.

Djakarta, 21 Oktober 1965

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA
REPUBLIK INDONESIA/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI,

t.t.d.

S U K A R N O

EKSPOR PRODUK NASIONAL BERMUTU

MEMPERTINGGI GENGGI NEGARA

Karena itu **mantrust** :

- memproduksi Corned Beef merk FORTUNA yang ekspornja telah dilaksanakan.
- membangun pabrik pengawetan nanas ditengah² hutan dekat GESEK (Kep. RIAU) dalam waktu 109 (seratus sembilan) hari realisasi Projek Nanas Kopedasan, untuk **produksi dan ekspor** nanas merk PARAMOUNT.

mantrust

Kantor Pusat : Dj. Halimun 22 Bandung — Tel. 4185-4186-5536

Perwakilan Djakarta : Dj. Raya Djatinegara Barat 124

Tel. 81335-81391-81392.

PRODUKSI DAN KONSUMSI KARET SEDUNIA

Djumlah produksi karet alam sedunia untuk bulan Djuli 1965 adalah sebesar 217,500 longton, yang mengakibatkan djumlah produksi sebesar 17,500 ton untuk tujuh bulan pertama tahun 1965.

Djumlah konsumsi : 175.000 ton untuk bulan

Djuli dan 1.327,500 ton untuk tujuh bulan pertama tahun 1965.

Konsumen terbesar untuk 7 bulan pertama tahun 1965 adalah Uni Sovjet sebesar 137,250 ton dan kemudian RRT sebesar 57,750 ton.

Demikian angka² statistik dari Sekretariat "International Rubber Study Group". (Antara).

DJUMLAH PENANGKAPAN IKAN DI DUNIA

Djumlah 19.000.000 ton ikan telah dapat ditangkap dalam tahun 1964 oleh bangsa² dibenua Asia dan Timur Djauh, dengan demikian mereka² menduduki tempat jang pertama sebagai penangkap ikan jang terbesar djumlahnja di dunia.

Tanpa jang ditangkap oleh seluruh negara di dunia mentjapai angka sebesar 51,6 djuta metric-ton untuk tahun 1964. Untuk tahun 1963 sebesar 47,5 djuta metric-ton sedunia dan 18,98 djuta metric-ton untuk Asia.

Setelah Asia maka Amerika Latin dengan hasil penangkapan 11,12 djuta ton atau 21% djumlah hasil tangkapan ikan sedunia untuk tahun 1964, merupakan daerah kedua didunia jang terbanjak menangkap ikan.

Belandjutanja menjusul berturut² Eropa dengan hasil sebanyak 9,66 djuta ton (19%), Uni Sovjet

4,48 djuta ton (9%), Amerika-Utara + Kanada + Karibia + Meksiko — Amerika Serikat mentjapai angka sebesar 4,28 djuta ton (8%) dan Afrika 2,91 djuta ton (6%).

Djepang dengan angka sebesar 6,334,700 ton untuk tahun 1964 merupakan negara penghasil ikan terbesar di Asia, meskipun angka untuk tahun 1963 lebih besar jaitu : 6,694,700 ton ; dan menduduki tempat kedua untuk negara penghasil ikan sedunia.

Jang menduduki tempat pertama penghasil ikan sedunia adalah Peru, dengan hasil penangkapan ikan sebanyak 9.130,700 ton untuk tahun 1964.

Kedudukan tersebut telah dipegang oleh Peru sedjak tahun 1962.

Demikian antara lain angka² jang diterbitkan oleh FAO. (Antara).

PRODUKSI TIMAH SEDUNIA

Konsumsi timah sedunia hanja menundjukkan kenaikan tipis sebanyak 900 ton selama masa tujuh bulan pertama th. 1965 dibanding dengan tahun jang sama tahun 1964, sedang hasil produksi bijih timah murni naik dengan 1,700 ton dan hasil peleburan meningkat dengan 6,000 ton. Produksi timah murni sedunia dalam masa Januari-Djuli 1965, tak termasuk hasil² dari Uni Sovjet, RRT dan negara² blok-Timur, berjumlah 86,500 ton dibanding dengan 84,800 ton untuk masa jang sama tahun 1964, sedang hasil peleburan bulan Djuli 1965 berdjumlah 13.200 ton dibanding dengan 12.700 ton bulan Djuni 1965.

Menegenai hasil produksi beberapa negara sbb. : Negara boneka Inggris "MALAYSIA" dalam 12 bulan jang berachir bulan Agustus 1965 berjumlah 62.200 ton, hampir sama dengan produksinja tahun 1956 jang berdjumlah 62.296 ton. THAILAND : Djanuari-Djuli 1965 keseluruhannya menghasilkan 10.623 ton. (Djuni 1965 : 5.623 ton, Djuli : 1,675 ton).

BOLIVIA : selama enam bulan (Djanuari-Djuni 1965) produksinja merosot hingga hanja menghasilkan 11,369 ton dibanding dengan tahun 1964 untuk masa jang sama (Djanuari-Djuni 1964) berdjumlah 11,972 ton walaupun ada kenaikan produksi dalam bulan Djuni 1965 sebanyak 2,011 ton dibanding dengan 1,648 ton dalam bulan Mei 1965.

NIGERIA : produksi Djanuari-Djuli 1965 meningkat dan berdjumlah 5,541 ton dibanding Djanuari-Djuli 1964 hanja 4,962 ton.

Hasil peleburan timah sedunia meningkat dengan 6,000 ton selama Djanuari-Djuli 1965 hingga berdjumlah 86,900 ton.

Konsumsi timah sedunia selama Djanuari-Djuli 1965 ditaksir berdjumlah 99,000 ton dibanding dengan 98,100 ton untuk Djanuari-Djuli 1964. Demikian antara lain Dewan Timah Internasional. (Antara).

PENDUDUK DUNIA

Laporan demografik tahunan dari PBB menunjukkan, bahwa penduduk dunia telah bertambah setengah kali dalam djangka waktu hidup manusia satu generasi.

Dalam tempo 33 tahun hingga tahun 1963 penduduk dunia telah bertambah dengan 1.000 djuta

sampai l.k. 3.160 djuta. Lebih dari separo kenaikan ini tertjatat di Asia.

Angka kelahiran tertinggi jang tertjatat ialah di Mali : 62 tiap 1.000. Kota terpadat didunia ialah Tokyo (8.733.000 jiwa, tidak termasuk pinggir kota, untuk tahun 1963). Kemudian disusul oleh New York : 8.086.000 jiwa. (Antara Spektrum).



Perusahaan
NIAGA NEGARA

P. N. PEMBANGUNAN NIAGA

Kantor Pusat: Hajam Wuruk No. 127 Djakarta

Telepon No. O.K: 21401 - 02 - 03

Melaksanakan Triprogram Pemerintah, dalam bidang perdagangan teknik.

1. Impor/Distributor :

Bahan baku; bahan bangunan; Obat²an pharniasi; bahan² kimia tehnik; mesin² kimia tehnik; mesin² perkebunan/pertanian; mesin² industri ringan/berat; mesin² logam/kaju; grafika; alat² besar & Road rollers; mesin² diesel & tenaga penggerak utama arus lemah; arus kuat; mesin² sandang (pemintalan, peradjudan, pertenunan, Finishing & printing).

2. Export/interinsulair :

Karet, kopra, hasil² bumi dan barang²tehnik.

3. Pembangunan projek² :

Perentjana & pelaksana; melengkapi; reparasi & revisi, Projek² umum dan industri.

Tjabang² Utama : Djakarta, Bandung, Semarang, Surabaja, dan Medan.

Tjabang² biasa : Palembang, Padang, Banda Atjeh, Makasar dan Manado.

Sub. Tjabang : Tjirebon

Perwakilan di luar Negeri: Tokyo, Amsterdam dan Manila.

HARGA PENJERAHAN KARET DARI MAINPORTS INDONESIA

NET PER POUND	BERLAKU PADA.	
	18 s/d 23 Okt. 1965	8 s/d 13 Nop. 1965
SS. I	US. \$. sen 19 3/8	US. \$. sen 19 1/8
SS. II	US. \$. sen 19 1/8	US. \$. sen 18 7/8
SS. III	US. \$. sen 18	US. \$. sen 17 3/4
SS. IV	US. \$. sen 17 3/8	US. \$. sen 17 5/8
SS. V	US. \$. sen 15 1/4	US. \$. sen 15 3/4
Thin Pale Crepe I	US. \$. sen 20 1/2	US. \$. sen 20 1/8
Thin Pale Crepe II	US. \$. sen 19 3/8	US. \$. sen 19 1/8
Thin Pale Crepe III	US. \$. sen 18	US. \$. sen 17 7/8
Brown 1 X	US. \$. sen 16 1/4	US. \$. sen 16 1/8
Brown 2 X	US. \$. sen 15	US. \$. sen 14 7/8
Brown 3 X	US. \$. sen 13 5/8	US. \$. sen 13 7/8
Blanket C (No. 3 Thick Blanket Crepe)	US. \$. sen 13 1/8	US. \$. sen 13 5/8
Blanket D (No. 4 Thick Blanket Crepe)	US. \$. sen 11 3/8	US. \$. sen 11 3/4
Smilled 3 (No. 3 Thin Brown Crepe)	US. \$. sen 13 1/8	US. \$. sen 13 5/8
Smilled 4 (No. 4 Thin Brown Crepe)	US. \$. sen 11 3/8	US. \$. sen 11 3/4
Latbark Crepe	US. \$. sen 8 1/8	US. \$. sen 8 3/8
Puttings A	US. \$. sen 17 1/2	US. \$. sen 17 1/4
Puttings B	US. \$. sen 16 1/8	US. \$. sen 16
Puttings C	US. \$. sen 14 3/8	US. \$. sen 14 3/4
Smoked Blanket I	US. \$. sen 14 5/8	US. \$. sen 15
Smoked Blanket II	US. \$. sen 13 1/8	US. \$. sen 13 5/8

W. HAKING INDUSTRI INDONESIA LTD.



**DJALAN BANDENGAN UTARA NO. 43
DJAKARTA - KOTA**

HARGA PENJERAHAN BARANG² EKSPOR GOLONGAN II

(Berlaku dari tgl. 8 Nopember s/d 20 Nopember 1965)

Pengumuman BLLD : No. 69/HP/65.

1. COPAL MALENGKET PER KWINTAL

kwaliteit P.W.S.	Nf.	69,—
kwaliteit M.A.P.	Nf.	59,—
kwaliteit W.S.	Nf.	62,—
kwaliteit W.S. (Batjaan)	Nf.	50,—
kwaliteit L.A.S.	Nf.	29,—
kwaliteit M.A.	Nf.	20,—
kwaliteit M.B.	Nf.	8,—

2. COPAL LOBA PER KWINTAL.

kwaliteit A	Nf.	67,—
kwaliteit B	Nf.	61,—
kwaliteit C. 1	Nf.	58,—
kwaliteit C. 2	Nf.	50,—
kwaliteit D.	Nf.	20,—
kwaliteit D.B.B.	Nf.	44,—
kwaliteit E	Nf.	41,—
kwaliteit I	Nf.	37,—
kwaliteit Dust	Nf.	10,—

3. KULIT KERBAU INTERMEDIATE PER KWINTAL.

berat 8 — 10 kg	DM.	210,—
berat 10 — 13 kg	DM.	214,—
berat 13 — 16 kg	DM.	221,—
berat 16 — 20 kg	DM.	229,—
berat 20 — up	DM.	233,—

4. KULIT KERBAU SECONDS PER KWINTAL.

berat 8 — 10 kg	DM.	170,—
berat 10 — 13 kg	DM.	172,—
berat 13 — 16 kg	DM.	179,—
berat 16 — 20 kg	DM.	185,—
berat 20 — up	DM.	189,—

5. KULIT KERBAU PIKCKERS PER KWINTAL.

berat 8 — 10 kg	DM.	119,—
berat 10 — 13 kg	DM.	123,—
berat 13 — 16 kg	DM.	129,—
berat 16 — 20 kg	DM.	138,—
berat 20 — up	DM.	148,—

6. KULIT KAMBING UKURAN 70 — 100 CM FIRST PER LEMBAR

berat average 34 kg (per 100 lembar)	Br. pence	57
berat average 37 kg (per 100 lembar)	Br. pence	60
berat average 40 kg (per 100 lembar)	Br. pence	63
berat average 50 kg (per 100 lembar)	Br. pence	74
berat average 60 kg (per 100 lembar)	Br. pence	84
berat average 65 kg (per 100 lembar)	Br. pence	89

berat average 70 kg

(per 100 lembar) Br. pence 99

7. KULIT KAMBING UKURAN 70 — 100 CM SECOND PER LEMBAR.

berat average 34 kg (per 100 lembar)	Br. pence	5
berat average 37 kg (per 100 lembar)	Br. pence	5
berat average 40 kg (per 100 lembar)	Br. pence	5
berat average 50 kg (per 100 lembar)	Br. pence	6
berat average 60 kg (per 100 lembar)	Br. pence	7
berat average 65 kg (per 100 lembar)	Br. pence	8
berat average 70 kg (per 100 lembar)	Br. pence	8

8. KULIT GIBAS UKURAN 70 — 100 CM FIRST PER LEMBAR.

berat average 50 kg (per 100 lembar)	Br. pence	
berat average 60 kg (per 100 lembar)	Br. pence	
berat average 70 kg (per 100 lembar)	Br. pence	

9. KULIT GIBAS UKURAN 70 — 100 CM SECOND PER LEMBAR.

berat average 50 kg (per 100 lembar)	Br. pence	
berat average 60 kg (per 100 lembar)	Br. pence	
berat average 70 kg (per 100 lembar)	Br. pence	

10. KOPI ROBUSTA PER KG.

EK. I	DM.	
EK. II	DM.	
EK. III	DM.	
20/25%	DM.	
AP. I	DM.	
AP. II	DM.	
G.B. 10/12%	DM.	
JAVA W.I.B./I	DM.	

11. KOPI ARABICA PER KG.

Sumatera/Sibolga D.P.	DM.	
Java W.I.B./I	DM.	
Java W.I.B./SUP	DM.	
Sulawesi Rantepao D.P.	DM.	
Sulawesi Kalosj D.P.	DM.	

awesi Rantepao Triage	DM.	1,02
awesi Kalosi Triage	DM.	2,16
COCOABEANS PER KG.		
liteit A	DM.	3,17
liteit B	DM.	3,—
PALA KUPAS PER KWINTAL.		
aw ABCD	DM.	559,—
aw Rimpel	DM.	521,—
aw BWP	DM.	421,—
ua ABC	DM.	430,—
ua BWP	DM.	352,—
PALA KUPAS MENADO — TAGULADANG — SANGIR BESAR — AMBON DAN TERNATE (BUKAN BANDA BUKAN SLAUW) PER KWINTAL		
.....	DM.	531,—
.....	DM.	496,—
.....	DM.	400,—
PALA PADANG BIDJO SARING PER KWINTAL		
.....	US\$.	109,—
PALA PADANG PER KWINTAL		
.....	US\$.	57,—
BUNGA PALA PER KWINTAL		
aw I	DM.	668,—
aw Gruis I	DM.	639,—
aw II	DM.	615,—
aw Gruis II	DM.	589,—
ua I	DM.	480,—
ua Gruis I	DM.	459,—
ua II	DM.	437,—
ua Gruis II	DM.	419,—
VANILI PER KG.		
liteit ABC	US\$.	5,21
liteit cuttings	US\$.	4,19
liteit loose-cuts	US\$.	4,19
COPRA CAKES/CHIPS PER KWINTAL (KADAR MINJAK MAX. 15%)		
.....	DM.	17,—
.....	DM.	18,—
.....	DM.	17,—
MINJAK FTERIS PER L.B.		
ak seroh minum 85/35%	Br. pence	33
ak nilam kwaliteit I	Br. pence	164
ak nilam kwaliteit II	Br. pence	151
ak cananga ester 20 up	Br. pence	174
ak akar wangi	E.£.	1/15/—
ak kaju tjedana	Br. pence	136
KATJANG TANAH KUPAS PER KWINTAL.		
.....	DM.	55,—
.....	DM.	64,—
KATJANG TANAH BERKULIT PER METRIC TON		
.....	US\$.	90,—
INDJUK DIPILIH DIPOTONG BASIS STANDARD 0,90 CM.		
.....	E.£.	210 9/6

24. BIDJI KAPOK PER METRIC TON.

in bulk	E.£.	12/2/1
in bags	E.£.	14/5/3

25. AMPAS TAPIOCA PER KWINTAL (KADAR PATI MAX. 73%).

ampas tapioca	DM.	4,50
tempung ampas tapioca	DM.	5,40

26. GAPLEK PER KWINTAL (KETJUALI LAMPUNG).

gaplek gelondong	DM.	6,—
tempung gaplek	DM.	5,50

27. TEPUNG TAPIOCA PER KWINTAL.

kwaliteit AAA	E.£.	1/2/-
kwaliteit AA	E.£.	1/1/-
kwaliteit A	E.£.	1/-/-

28. PINANG PER KWINTAL (BUKAN PINANG ATJEH).

sliced kwaliteit I	DM.	29,—
kwaliteit II	DM.	23,—
kwaliteit III	DM.	15,—
splits kwaliteit I	DM.	23,—
kwaliteit II	DM.	16,—
bulat putih	DM.	11,—
bulat merah	DM.	10,—

29. HWAN HIDUP PER EKOR.

sapi ex Bali	HK\$.	166,—
sapi ex Banda Atjeh	HK\$.	140,—
sapi ex Lombok	HK\$.	159,—
sapi ex Sumba	HK\$.	117,—
sapi ex Timor	HK\$.	105,—
sapi ex Djawa Timur/Surabaya	HK\$.	110,—
sapi ex Madura	HK\$.	85,—
kerbau ex Bali	HK\$.	140,—
kerbau ex Banda Atjeh	HK\$.	120,—
kerbau ex Sumbawa Besar	HK\$.	152,—
kerbau ex Lombok, Bima, Sumba, Flores	HK\$.	142,—
kerbau ex Djawa Timur/Surabaya	HK\$.	107,—
kerbau ex Sulawesi Selatan	HK\$.	80,—
babi	HK\$.	35,—

30. GAMBIR PER KWINTAL.

gambir kembang No.1	E.£.	16/2/-
gambir bulat	E.£.	13/8/-
gambir persegi hitam (extrac)	E.£.	6/-/-

31. DJAGUNG PER METRIC TON.

kuning/putih	US\$.	34,—
m e r a h	US\$.	33,—

32. TEH HIDJAU PER KG.

(TEH RAKJAT)	HK\$.	1,30
--------------------	-------	------

P.T. NILAKANDI

IMPORT - EXPORT & INDUSTRI

Head Office : Djakarta

Address : 85 FE Pedjagalan

Phone : 21168 - 21714

Cable : NILA DJAKARTA

- Branches** :
1. Djalan Karet 20, Palembang
 2. Djalan Sarenarwa 409, Telukbetung
 3. Djalan Raya Sapat, Indragiri
 4. Djalan Tengah, Rengat
 5. Djalan Imam Bondjol 163, Padang
 6. Djalan Kali Baru Barat 9, Semarang

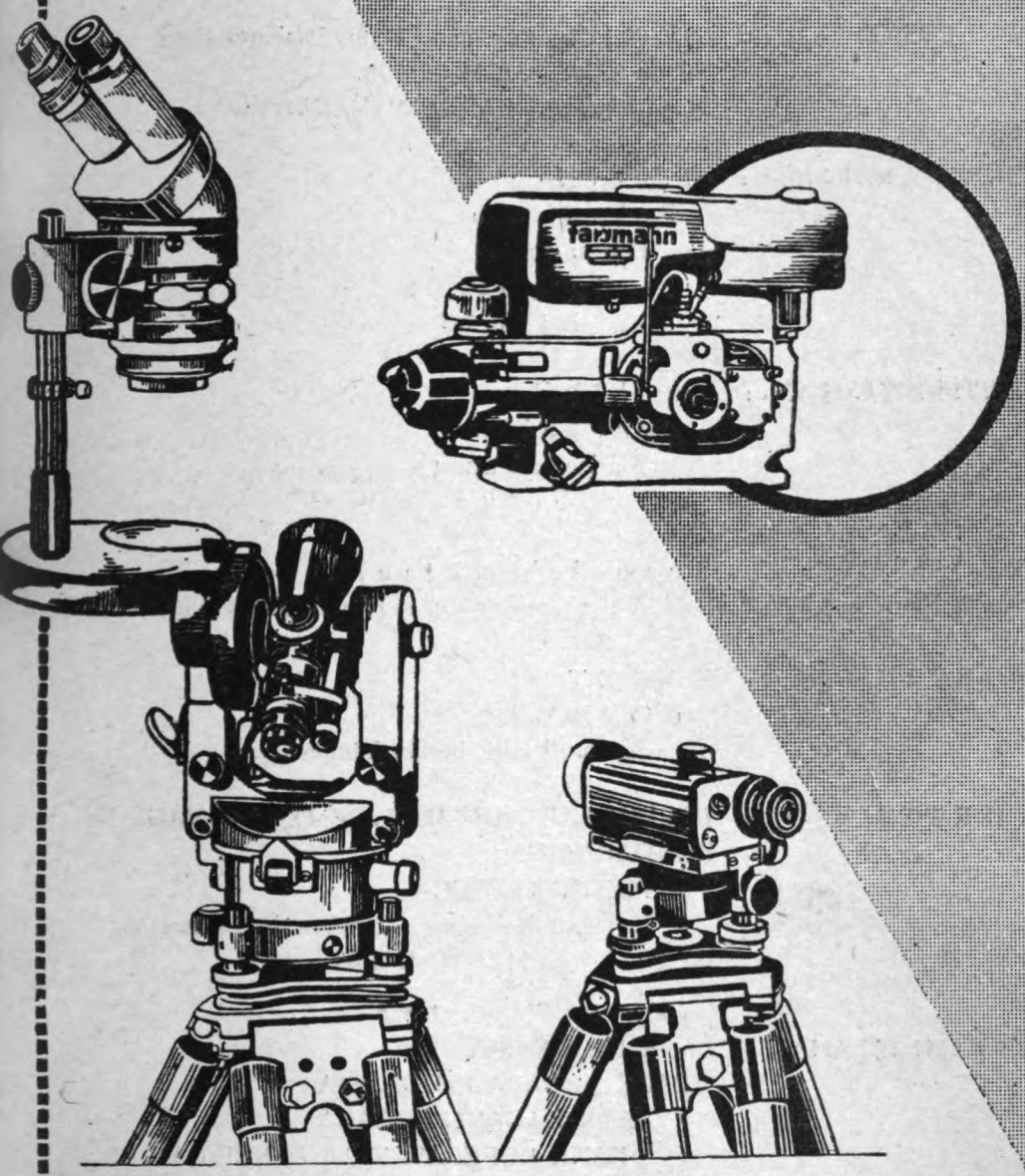
Export :

**RUBBER
COPRA
COFFEE
PEPPER
CASSIA VERA**

Import : All kinds of Commodities

WILD HEERBRUGG

Farymann Diesel



D. N. PANTJA NIAGA



P.T. "KARKAM"

(P.T. KULIT ATJEH RAYA KAPTEN MARKAM)

KANTOR PUSAT : Djl. Pintubesar Selatan 97 atas Djakarta-Kota
Tilpon 23368 - 22644 - 21092
alamat kawat : KARKAM DJAKARTA

KANTOR TJABANG : M E D A N
P e k a n b a r u
D u m a i
R e n g a t
D j a m b i

KANTOR PERWAKILAN : T e m b i l a h a n
B e n g k a l i s
P a l e m b a n g
S i b o l g a

PPN P.T. KARKAM : A e r m o l e k (R i a u)
Perusahaan Remilling P.T. KARKAM : Kampung Lalang Sunggal (Sumatra Utara)

EXPORTIR : K A R E T
K O P R A
dan hasil perkebunan lainnja

IMPORTIR : B A R A N G ² K E P E R L U A N P E M B A N G U N A N
K E N D A R A A N ²
M E S I N ² D I E S E L
untuk berbagai matjam keperluan
M E S I N ² K A P A L

* * *

BANK² KAMI IALAH : B A N K I N D O N E S I A
B A N K N E G A R A I N D O N E S I A
B A N K D A G A N G N E G A R A
B A N K K O P E R A S I T A N I & N E L A J A N

* * *

** Dalam rangka „banting setir” untuk „berdikari” dibidang ekonomi dan pembangunan,
P.T. KARKAM melaksanakan kegiatan²-nja semata-mata untuk membantu Pemerintah.

** Sembojan kami "MADJU TERUS PANTANG MUNDUR" UNTUK KEMENANGAN
REVOLUSI dan UNTUK TERTJAPAINJA MASJARAKAT SOSIALIS INDONESIA.

MADJALAH
„WARTA PERDAGANGAN”

Terbit tiap 2 Minggu sekali

Diterbitkan oleh :

Departemen Perdagangan Dalam Negeri/
Urusan Perdagangan Luar Negeri.

Pelindung :

J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/
Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri
BRIG. DJENDERAL A. JUSUF

Pemimpin Umum :

Ir. J.J. Pitoy M.A.

Dewan Redaksi :

Dr J. Panglaykim — Major Drs Sukadjat
— Ir J.J. Pitoy M.A. — Drs Darwis Umar
— Anwar B. Harahap — J. Lapan —
Ir Didi Abdurachman. —

Peuanggung Jawab :

Anwar B. Harahap.

Pembantu Tetap :

Prof. Ir Teko Soemodiwirjo
Kol. Jusuf Ramli
R. Hertatijanto S.H.
Drs Waskito

Pembantu Khusus :

Kolonel Usman Ismail — Alamsjah S.B.P. —
R.H. Tuwaidan M.A. — Drs Sjaaf Mochtar
— R. Isa — Budhiman B.A. — Suprpto —
Sudjadi — A. Karim Usman S.H.

Alamat Redaksi dan Tata Usaha :

Madjalah "WARTA PERDAGANGAN"
Direktorat Marketing dan Research
Djl. Tanah Abang Timur No. 87,
D J A K A R T A.

Pelaksana/Pertjetakan :

Kepala Pertjetakan P.N. Karya Tjotas
Burdi Reksodirdjo.

Pembayaran uang langganan dilakukan dimuka dengan :

1. Penjetoran atas Rekening Madjalah Warta Perdagangan Kode No. KB/WA/194, pada Bank Negara Indonesia Unit I Djl. Thamrin, Djakarta.
2. Dinas Giro dan Tjek Pos atau dengan pos wesel jang langsung dialamatkan kepada Tata Usaha Warta Perdagangan Direktorat Marketing dan Research.

DAFTAR — ISI

1. Menteri Perdagangan laporkan hasil kunjungannya ke luar Negeri kepada Presiden
2. LADINDO dan Personalianja
3. B a t i k
4. Sekitar masalah S.P.P.
5. Perobahan tugas, fungsi serta susunan K O T I
6. Pembubaran K O T O E
7. Ketentuan² tentang pengimporan barang² untuk projek²
8. Survey barang² jang diimpor atas beban Devisa Negara
9. Pemberantasan hama "Lasioderma"
10. Varia berita singkat ekonomi perdagangan dalam negeri
11. Varia berita singkat ekonomi perdagangan internasional
12. Djepang dan masalah impor bahan makanan
13. Daun "Tendu" untuk rokok "bidi"
14. Adjaran² Pemimpin Besar Revolusi



IZIN TERBIT :

Keputusan Menpen No. 00231/R/SK D
SIT/65 tgl. 3-9-1965, dan

Keputusan Peperda Djakarta Raya dan Seki
No. Kep. 037/P/X/65, No. Urt. 5 tgl. 21-10

Menperdag Laporkan Hasil Kundjungannya ke Luar Negeri Kepada Presiden

Menteri Perdagangan Brigdjen Achmad Jusuf pagi tanggal 25 Nopember 1965 telah melaporkan kepada Presiden Sukarno di Istana Merdeka mengenai hasil kundjungannya keluar negeri ini untuk menjaksikan kemadjuan² perdagangan kita di luar negeri, dewasa ini.

Selesai pertemuan dengan Presiden, Menteri Perdagangan Brigdjen Achmad Jusuf menjelaskan bahwa dengan terdjadinja peristiwa petuangan kontra revolusi apa jang menamakan diri „Gerakan 30 September”, harga barang jang asal dari Indonesia mendjadi meningkat harjaja di pasaran dunia. Hal tersebut disebabkan, karena mereka tidak tahu apakah barang-barang Indonesia segera akan tiba atau tidak, dan apakah Indonesia dapat meneruskan ekspornja.

Maka banjak pengusaha² diberbagai negara nakai hasil² Indonesia jang mulai menimbun barang² Indonesia.

Selandjutnja didjelaskan bahwa hasil bumi barang ekspor dari Indonesia selalu laku dan dikai oleh negara² Eropa maupun Asia dan digaskan bahwa dalam hal kopi sebenarnja kimempunjai posisi monopoli di Muangthai, karena Muangthai hanja ingin membeli kopi Indonesia.

Pelelangan tembakau lebih baik.

Menperdag Brigdjen Achmad Jusuf mendjelaskan bahwa pelelangan tembakau Indonesia di Bremen untuk tahun 1965, telah menghasilkan sepuluh djuta dollar Amerika Serikat lebih baik dari hasil pendjualan tiap² tahun j.l., meski-

pun djumlah tembakau Indonesia tahun ini kurang dari tahun² j.l. Hal tersebut menurut penegasan Brigdjen Achmad Jusuf, karena sekarang pelelangan tembakau Indonesia di Bremen dilakukan sendiri, sedangkan diwaktu² j.l. dilakukan melalui makelar atau perantara orang Djerman.

Prestasi PNN positif.

Selandjutnja didjelaskan bahwa dalam kundjungannya ke beberapa negara di Eropa dan Asia baru² ini, dapat dilihat bahwa prestasi² Perusahaan² Niaga Negara jang mengalami perombakan beberapa bulan jang lalu dewasa ini menundjukkan prestasi jang lebih positif.

Dalam hal ini PNN di luarnegeri untuk tahun 1965 ini menundjukkan angka² jang naik dan tidak membutuhkan subsidi lagi dari Pemerintah, bahkan sekurang²nja telah dapat berdiri.

Hasil industri Indonesia punja pasaran.

Didjelaskan pula bahwa hasil industri Indonesia atau „barang² sudah” Indonesia seperti sepatu, pantji, tekstil, benda² kulit lainnja dll. mempunjai pasaran jang tjukup baik di negara² Asia Selatan.

Hal tersebut adalah laporan jang didapat Menteri dari missi industrialis Indonesia jang baru² ini mengadakan kundjungan ke beberapa negara di Asia Selatan.

Didjelaskan pula bahwa para importir negara² tsb. besar minatnja untuk membeli barang² Indonesia. (Antara).

...sai melaporkan ha-
...kundjungan beliau
...ar negeri kepada
...Presiden Menteri
...dagangan Brigdjen A.
...f memberikan kete-
...an kepada pers ibu-

(Foto : IPPHOS).



Pembentukan Badan Koordinasi Lada Indonesia (Ladindo)

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
DALAM NEGERI/KUASA MENTERI PERDAGANGAN
LUAR NEGERI No. : 0117/12/MPLN/
SK/65

MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI/
KUASA MENTERI PERDAGANGAN LUAR
NEGERI,

MENIMBANG :

- a). bahwa dalam rangka politik Banting Stir dan sehubungan dengan usaha untuk Berdiri diatas kaki sendiri dalam pemasaran lada jang dihasilkan di Indonesia perlu ditijptakan kerdja sama antara Perusahaan Niaga Negara, Perusahaan Sortasi dan Eksportir-Eksportir Lada Swasta setempat dalam bentuk suatu **BADAN KOORDINASI LADA INDONESIA** ;
- b). bahwa Badan Koordinasi Lada Indonesia harus merupakan alat Revolusi baik untuk mendjamin kelangsungan budi daya lada maupun untuk menghadapi konsumen lada diluar negeri serta mengusahakan agar dapat diperoleh manfaat jang se-besarnya bagi kepentingan daerah penghasil lada chususnja dan kepentingan Negara dan Bangsa Indonesia umumnja.

MENINGAT :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 256 Tahun 1965 tanggal 2 September 1965 tentang pembentukan Komando Operasi Berdikari (KOTARI) ;
2. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1965 tgl. 17 Mei 1965 ;
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia No. Aa/B/44/1965 tanggal 29 Maret 1965.

MEMPERHATIKAN :

Hasil-hasil rapat dari para pengusaha ekspor dan sortasi lada jang diadakan di Telukbetung dan di Djakarta.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

1. Mentjabut Surat Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri No. 0163/10/MPLN/SK/65, tgl. 25 Oktober 1965, tentang Pembentukan Badan Kodrdinasi Lada Indonesia.
2. Pembentukan Badan Koordinasi Lada Indonesia, disingkat LADINDO, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1.

- a. Jang mendjadi peserta Ladindo ialah Perusahaan-Perusahaan Niaga Negara, Perusahaan-Perusahaan Ekspor Swasta dan Perusahaan-Perusahaan Sortasi Lada jang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri ;
- b. Para Eksportir peserta Ladindo merupakan Unit² dari Badan Koordinasi ini jang langsung melaksanakan ekspor lada keluar negeri ;
- c. Para peserta Lalindo tertjantum didalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- d. Setiap eksportir lada diwadajibkan mendjadi peserta Ladindo dan ekspor lada dilaksanakan hanya oleh peserta Ladindo.

Pasal 2.

LADINDO bertudjuan untuk mendjamin kelangsungan budidaya lada didalam negeri di Indonesia dan merupakan alat Revolusi dan alat Pemerintah Indonesia untuk memperkuat posisinya dipasaran Internasional.

Kegiatan-kegiatan LADINDO adalah antara lain :

- a. Mendjalankan usaha-usaha sebagai faktor pemendorong kedjurusan penjempurnaan dan modernisasi serta perkembangan produksi/upgrading industri lada di Daerah-daerah penghasil lada ;
- b. Menetapkan kesatuan tindakan jang dilaksanakan oleh masing-masing unit/peserta LADINDO baik dalam bidang pengumpulan pembelian lada didalam negeri maupun dalam pemasaran/pengeksporan keluar negeri, serta dan lain berdasarkan kondisi serta sjarat-sjarat jang sebaik-biknja ;
- c. Mengadakan keseragaman dalam kualitas standard lada untuk ekspor ;
- d. Membina dan mendorong kelanjutan pelaksanaan ekspor lada jang dilakukan oleh tiap eksportir peserta ;
- e. Kegiatan-kegiatan lain jang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 3.

Tempat kedudukan dan kantor-kantor LADINDO didalam negeri adalah sebagai berikut :

- a. LADINDO Pusat berkedudukan di Telukbetung ;

Kantor penghubung LADINDO diadakan di Djakarta ;
Sesuai perkembangan aktivitasnya, LADINDO dapat membentuk perwakilannya baik didalam maupun diluar negeri.

Pasal 4.

Susunan BADAN KOORDINASI LADINDO dalam negeri adalah sebagai berikut :

Para peserta.
Badan Pengurus.
Sekretariat Badan Pengurus.
Pimpinan Kantor Penghubung.
Badan Pengawas.

Pasal 5.

Setiap peserta LADINDO diwajibkan menje-
tor sebagai tanda peserta sedjumlah 5 (lima
juta rupiah), untuk dijadikan modal kerdja
LADINDO.

Penghasilan-penghasilan LADINDO lainnya
ditetapkan oleh Menteri Perdagangan Dalam
Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Ne-
geri atas usul para peserta.

Pasal 6.

LADINDO dipimpin oleh suatu Badan Peng-
urus yang terdiri dari 3 (tiga) orang pimpinan
yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan
Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan
Luar Negeri. Badan Pengurus tersebut meru-
pakan suatu Badan Collegial dengan seorang
Ketua setjara bergiliran (periodik) 4 (empat)
bulan.

Untuk melaksanakan pekerdjaan sehari-hari
Badan Pengurus LADINDO membentuk Sek-
retariat.

Pimpinan Kantor Penghubung terdiri dari 2
orang yang ditetapkan oleh Menteri Perdagang-
an Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan
Luar Negeri atas usul peserta.

Pasal 7.

Untuk melakukan pengawasan terhadap kegi-
atan-kegiatan LADINDO, dibentuk suatu Ba-
dan Pengawas yang terdiri dari :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lam-
pung sebagai penasehat.
2. Kepala Perwakilan Departemen Perdagangan
Daerah Tingkat I Lampung sebagai
Ketua.
3. Kepala Biro Lalu Lintas Devisa setempat
sebagai anggota.
4. Kepala Kantor Bea dan Tjukai setempat
sebagai anggota.
5. Wakil dari Perusahaan-perusahaan Niaga
Negara setempat sebagai anggota.
6. Wakil dari Perusahaan-perusahaan Sortasi
lada setempat sebagai anggota.
7. Wakil dari Pengusaha-pengusaha Ekspor
Swasta setempat sebagai anggota.
8. Wakil dari G.P.E.I.S. setempat sebagai ang-
gota.

- b. Bila dianggap perlu Menteri Perdagangan
Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan
Luar Negeri dapat menambah keanggotaan
Badan Pengawas atas usul Badan Pengurus.
Badan Pengawas LADINDO tersebut diatas
diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Per-
dagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Per-
dagangan Luar Negeri.

Pasal 8.

Untuk melaksanakan pendjualan/pemasaran
lada dari para peserta LADINDO dengan keten-
tuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. N.V. LADINDO berkedudukan di Amsterdam
dengan mempunyai perwakilanja di New
York.
- b. N.V. LADINDO merupakan badan hukum
yang disesuaikan dengan undang-undang dan
peraturan-peraturan yang berlaku setempat,
dengan modal statuter sedjumlah Nf. 330.000,-
terbagi atas 22 saham, masing-masing sebesar
Nf. 15.000,- yang harus disetor penuh oleh
masing-masing pemegang saham.
- c. Saham-saham tersebut dalam ayat (b) pasal
ini atas nama dan tidak diizinkan diperdjual
belikan.
- d. Semua eksportir peserta LADINDO di Indo-
nesia diwajibkan mendjadi pemegang saham
dari N.V. LADINDO diluar negeri.
- e. Dalam hal seorang eksportir lada/pemegang
saham N.V. LADINDO ternyata tidak aktif
lagi dalam bidang ekspor lada, maka saham
atas nama eksportir tersebut harus diserah-
kan/didjualkan kepada N.V. LADINDO.
- f. Susunan N.V. LADINDO diluar negeri adalah
sebagai berikut :
 1. Pemegang saham.
 2. Direksi.
 3. Dewan Komisaris.

Pasal 9.

Kedudukan dan tugas dari N.V. LADINDO
tersebut dalam pasal 8 dari Keputusan ini adalah:

- a. Merupakan pendjual tunggal dari semua lada
yang dikirimkan oleh eksportir lada/peserta
LADINDO di Indonesia.
- b. N.V. LADINDO, harus memperhatikan me-
lajani dan mengurus kepentingan para ekspor-
tir lada/peserta LADINDO diluar negeri.
- c. Melaksanakan trade promotion dan market
research dipasaran lada Internasional.
- d. Tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh LA-
DINDO di Indonesia dan oleh Kuasa Menteri
Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 10.

- a. Direksi N.V. LADINDO di Amsterdam mau-
pun Direksi perwakilan N.V. LADINDO di
New York diangkat dan diberhentikan oleh
Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri atas
usul para pemegang saham N.V. LADINDO.

b. Direksi N.V. LADINDO bertanggung djawab kepada Dewan Komisaris N.V. LADINDO.

Pasal 11.

a. Dewan Komisaris N.V. LADINDO ditetapkan oleh Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri atas usul para pemegang saham N.V. LADINDO dan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berkedudukan di Indonesia sebagai berikut :

1. Seorang dari Perusahaan Niaga Negara.
2. Seorang dari Pengusaha Eksportir Swasta.
3. Seorang Pedjabat dari Departemen Perdagangan yang ditunjuk oleh Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri.

b. Dewan Komisaris N.V. LADINDO bertanggung djawab kepada pemegang saham dalam hal ini dapat diwakili oleh Pengurus LADINDO.

Paasal 12.

a. Hal-hal yang belum atau belum tjukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri.

b. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkanja.

Agar umum mengetahuinja, memerintahkan penempatan Keputusan ini dalam Berita Negara.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 2 Desember 1965.

**MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI/
KUASA MENTERI PERDAGANGAN
LUAR NEGERI,**

t. t. d.

A. Y U S U F

(Brig. Djendral T.N.I.)

**LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN**

**MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
KUASA MENTERI PERDAGANGAN
LUAR NEGERI**

No. 0177/12/MPLN/SK/'65,
tanggal 12 Desember 1965.

DAFTAR NAMA² PARA PESERTA LADINDO

1. C.V. Kretek.
2. N.V. Bakrie & Brothers.
3. P.T. Nilakandi.
4. Fa. Mitro.
5. Fa. Kemas Saman.
6. C.V. Singalaga.
7. P.T. Indonesia Central Agencies Ltd.
8. C.V. Sumber Djaya.
9. Fa. Berwita Trad. Coy.
10. P.N. Aneka Niaga I.
11. P.N. Aduma Niaga I.
12. P.N. Pembangunan Niaga II.
13. P.T. Elyana & Co.
14. P.T. Lembah Gunung.
15. P.T. Tandjung Djati.
16. P.N. Satya Niaga.
17. P.N. Aneka Niaga II.
18. N.V. Dasaad Musin Concern.
19. P.N. Pantja Niaga.
20. P.N. Aduma Niaga II.
21. N.V. Djakarta.
22. N.V. Rahman Tamin.

**MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
KUASA MENTERI PERDAGANGAN
LUAR NEGERI,**

t. t. d.

A. Y U S U F

(Brig. Djendral T.N.I.)

PERSONALIA BADAN KOORDINASI LADA INDONESIA (LADINDO).

Dengan Keputusan² J.M. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri Brigdjen. Achmad Jusuf telah ditetapkan personalia Badan Koordinasi Lada Indonesia (LADINDO).

1. **Badan Pengawas LADINDO di Telukbetung :**

- a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung sebagai Penasehat ;
- b. Drs. Human Harsono, Kepala Perwakilan Departemen Perdagangan Dalam Negeri/Urusan Perdagangan Luar Negeri Daerah Tk. I Lampung sebagai Ketua.
- c. Kepala Biro Lalu Lintas Devisa Telukbetung sebagai anggota.
- d. Kepala Kantor Bea dan Tjukai Telukbetung sebagai anggota.
- e. Zainuddin Zenet dari peserta Perusahaan Niaga Negara sebagai anggota.
- f. Liem Chao Shih dari peserta Swasta sebagai anggota.
- g. H. Mukmin, Ketua DPD G.P.E.I.S. Tjombang Telukbetung sebagai anggota.

2. **Badan Pengurus LADINDO di Telukbetung :**

- a. Tji' Din, dari Daerah Tingkat I Lampung dan dari peserta Swasta, sebagai Pemimpin Bidang Umum merangkap Ketua.
- b. Drs. Lee Soei Siang, dari peserta Swasta, sebagai Pemimpin Bidang Organisasi dan Pemasaran merangkap Wakil Ketua I.
- c. Bisono, dari peserta Perusahaan Niaga Negara, sebagai Pemimpin Bidang Produksi dan Sortasi merangkap Wakil Ketua II.

3. **Badan Penghubung LADINDO di Djakarta :**

- a. Letkol. M. Purba, dari Perusahaan Niaga Negara.
- b. Lie Tjoan Lie, dari peserta Swasta.

Personalialia Badan Koordinasi LADINDO anggota² Badan Pengawas, Badan Pengurus dan Badan Penghubung) tersebut diatas diangkat untuk waktu dua tahun dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 4 Desember 1965 No. 0178/12/MPLN/SK/1965.

4. **N.V. LADINDO di Amsterdam.**

Dengan Keputusan Menteri Perdagangan No. 0179/12/MPLN/SK/'65 tgl. 4 Desember '65 ditetapkan pengangkatan **S. Soeparto S.H.**

sebagai Direktur Utama N.V. LADINDO di Amsterdam.

Sebagai Direktur N.V. LADINDO di Amsterdam ditetapkan **Bagdja Nitidw' rja** disamping djabatannja sebagai Pimpinan PN Dharma Niaga di Amsterdam. (Keputusan No. 0181/12/MPLN/SK/'65).

5. **Untuk Kantor Tjambang N.V. LADINDO di New York** ditetapkan **A. Th. Manusama** sebagai Managing Director disamping djabatannja sebagai Managing Director C.I.T.C. New York (Keputusan No. 0180/12/MPLN/SK/1965).

6. **Dewan Komisaris N.V. LADINDO :**

Dengan Keputusan Menteri Perdagangan No. 0182/12/MPLN/SK/'65 tanggal 4 Desember 1965 ditetapkan susunan Dewan Komisaris N.V. LADINDO sbb. :

- a. Major Djukardi Odang S.H. dari peserta Perusahaan Niaga Negara.
- b. Hamizar Hamid BBA dari Peserta Swasta.
- c. Alamsjah Sutan Badaro Pandjang dari Departemen Perdagangan.

Dalam suatu upatjara bertempat digedung D.P.R.D.-G.R. Daerah tingkat I Lampung di Tandjung karang, pada Djum'at pagi tanggal 10 Desember 1965 telah dilantik personalialia Badan Koordinasi Lada Indonesia (LADINDO) tersebut diatas.

Pelantikan tersebut dilakukan oleh Ir. J.J. Pitoy M.A. Kepala Direktorat Marketing dan Research yang bertindak atas nama Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri.

Hadir dalam upatjara tersebut antara lain Pantjatunggal Daerah tingkat I Lampung, pedjabat² Pemerintah para pengusaha/ekspertir Daerah tingkat I Lampung.

Pantjatunggal serta pembijtjara² lainnja dalam memberikan sambutan pada upatjara tersebut, menjambut dengan gembira serta menjatakan dukungannja serta bantuan sepenuhnya agar LADINDO yang berpusat di Daerah Lampung itu betul² dapat berhasil dan mentjapai sukses dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggungjawab yang diberikan padanja.

B A T I K

I. PENDAHULUAN

Bagi orang asing, apalagi bila sudah pernah berkundjung ke Indonesia atau pernah melihat peri ke-Indonesiaan dinegaranja, maka tiada berkelebihan kiranja apabila ia mendengar perkataan "b a t i k" akan terbajanglah dihadapannja, seorang gadis Indonesia jang manis dan ramah jang berpakaian/mengenakan kain batik, berbadju kebaja dan berselendang jang tampak harmonis itu.

Memang bagi rakyat Indonesia batik adalah merupakan salahsatu benteng kepribadian nasionalnja, karena batik adalah salahsatu dari sekian banjak ragam busana daerah Indonesia, jang telah diterima dengan bangga dan rasa sjukur dari nenek mojang bangsa Indonesia, karena ia mempunyai nilai seni jang tinggi pula.

Namun, dalam kenjataanja, dengan sepotong batik jang berukuran lebar 42" dan pandjang $\pm 2,9$ yards akan dapat mendjadikan batik sebagai bahan busana untuk setiap bangsa, seperti gaun, pakaian sport, kemedja dan lain², untuk pria maupun wanita. Dan batik ini adapula jang dibuat dalam bentuk taplak medja, hiasan dinding, alas tempat tidur dan lain² penggunaan khusus lagi.

Untuk menambah pengetahuan mengenai seni batik jang tinggi nilainja ini, maka dibawah ini diuraikan beberapa hal mengenai batik: sedjarah, proses pembatikan, golongan dan tjiri² kain batik dan pemeliharaannja.

II. SEDJARAHNJA.

Menurut kebanyakan ahli sedjarah, batik/seni batik ini berasal dari India. Malahan ada jang mengatakan berasal dari Turki dan Mesir jang dibawa ke Indonesia melalui Parsi dan India oleh para pedagang dan perantau.

Akan tetapi menurut kenjataanja, perkataan "b a t i k" tidaklah dapat dipisahkan dengan Indonesia, seperti halnja dengan "wayang" Bali dsb. Dalam hal mendapatkan pengaruh dari kebudayaan negara² lain adalah wadjar, namun dalam hal ini batik tidak kehilangan kepribadianja.

Adapun kemungkinan terdapatnja kemiripan bentuk hiasan dalam tjorak batik dengan bentuk hiasan tjorak di negara² lain, hal ini tidaklah mustahil. Karena ketjuali kemungkinan mendapatkannja pengaruh, djuga tidak dapat disangkal lagi, bahwa suatu pernyataan daripada pentjipta jang dilukiskan pada sesuatu bentuk hiasan tidaklah mustahil pula akan mendapatkan persamaan² dengan pentjipta lainnja, karena seperti diketahui, pernyataan dan perasaan itu timbulnja adalah dari hati nurani manusia djuga, sama manusianja hanja mungkin berbeda kebangsaannja.

Dengan demikian membuktikan, kebenaran akan tudjuan revolusi Indonesia untuk membangu dunia baru tanpa adanja penghisapan oleh bangsa atas bangsa lain, oleh manusia atas manusia jang lain, sebab bukankah manusia diseluruh dunia ini adalah sama manusianja, sama machluk Tuhan Seru Sekalian Alam.

Bilamana batik mulai dikenal di Indonesia, belumlah ada data jang pasti. Akan tetapi dapat disebutkan, bahwa sebutan "b a t i k" telah tertjantum dalam suatu naskah Sunda-kuno dari tahun 1440 Saka atau 1518 Masehi. Namun, tjorak/hiasan motif batik dapat kita saksikan dalam hiasan² kain pada patung radja²/tokoh² lainnja. a.l. misalnja hiasan tjorak "kawung" pada kain jang dikenakan oleh Radja Kertaradja, radja pertama dari Madjapahit (1294 — 1309 M).

Apakah kain jang dikenakannja itu adalah kain batik ataukah kain tenunan biasa, belumlah dapat disingkap rahasianja. Namun pada pokoknja seni batik telah ada pada djaman tersebut.

Menurut Dr. J.L. Brandes, seorang ahli sedjarah, dinjatakan bahwa batik adalah asli Indonesia, jang artinja telah terdapat di Indonesia sedjak sebelum adanja pengaruh kebudayaan Hindu. Pernyataan ini dikenal dengan 10 pokok Brandes, jang a.l. meliputi djuga pernyataan bahwa suatu susunan masjarakat dan negara jang teratur, wajang, gamelan, seni logam, ilmu perbandingan dll. memang telah terdapat di Indonesia sedjak sebelum adanja pengaruh kebudayaan Hindu.

Menurut Dr. A. Alfred Steinmann, seorang mahaguru dari Zurich University, seni atau teknik batik ini ditemukan pula di Tiongkok, Djepang, India, Siam, Turkistan Timur, Eropa, dan djuga di Afrika dan Amerika Selatan. Walaupun menurut penemuan dalam sebuah kuburan Mesir Kuno didapati setjarik kain jang diduga sebagai hasil proses batik, namun dari naskah² pembuktian sedjarah tertjatat, bahwa sebutan hasil seperti batik ini di India baru terdapat dalam tahun 1677. Dengan demikian lebih memperkuat hasil penemuan Brandes tersebut diatas.

Mengingat akan keadaan pada djaman kekuasaan radja², maka kiranja tidaklah dapat disangkal, apabila seni keradjinan batik semula adalah seni keradjinan jang tumbuh serta berkembang dikalangan keraton (istana) atau bangsawan² sadja. Keradjinan membatik pada waktu itu adalah merupakan keradjinan para putri radja atau bangsawan, jang ketjuali untuk menundjukkan akan hasil karya seni jang dibanggakan daripada putri² tersebut, djuga sebagai pekerdjaan sambilan untuk mengisi kekosongan waktu karena ketiadaan aktivitas lain jang memerlukan pentjurahan tenaga dan waktu se-banjak²nja.

Aktivita untuk masjarakat, untuk rakjat ba- para putri radja atau bangsawan pada waktu pembuatan kain batikpun hanjalah merupan monopoli daripada kaum bangsawan yang berdiam lingkungan keraton (istana) sadja.

Akan tetapi, kemudian, berhubungan dengan kawinan² putri² istana dengan para bangsawan yang berdiam diluar daerah istana, maka penge- uan atau seni batik inipun mulai keluar dari lingkungan tembok istana dan menjebar kedae- ran² yang pada ahirnja hingga sampai pada rak- djelata.

Hal yang terachir ini adalah merupakan tun- tan sedjarah tuntutan revolusi Indonesia, sesuai dengan kepribadian Indonesia jg telah tersimpul- kan salahsatu sila (sila kerakjatan) dari "PAN- DASILA" dasar negara Republik Indonesia seba- hasil penggalian Presiden/Pemimpin Besar Re- sasi Bung Karno. Ini berarti pula, bhw didalam- ara Republik Indonesia, tidaklah dibenarkan- nia tidak ada satu seni apapun yang hanja men- mili milik perseorangan dan atau golongan, akan- pi seni itu adalah mendjadi milik rakjat dan- anggaan bangsa.

Sedjak tahun 1948, pengusaha batik yang ter- ung dalam koperasi² batik mendirikan Ga- gan Koperasi Batik Indonesia (G.K.B.I.).- gga pertengahan tahun 1965 tertjatat G.K.B.I.- nggotakan 40 Koperasi² Batik Primer meli- djumlah anggota pengusaha sebanjak 11.654- g. Djumlah pekerdja seluruhnja lebih kurang- 00 orang.

Kebutuhan bahan baku mori untuk konsu- dalam negeri setahunnja diperlukan 90 djuta- r. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut ma- ebagian besar kita harus masih mengimpor- Dalam rangka "BERDIKARI" maka kini se-- giat dilakukan perluasan pabrik² mori.

PROSES PEMBATIKAN.

Setjara garis besarnja, proses pembatikan- h meliputi pekerdjaan sebagai berikut :

Terlebih dahulu mori disobek/dipotong² me- menurut ukuran yang dikehendaki, biasanja- 2,3 @ 2,9 yards. Mori bekas sobekan, adaka- anja didjahit, adakalannya pula tidak.

Kemudian mori itupun ditjutji dengan mak- sud untuk menghilangkan kandji yang terda- pat dalam benangnja hingga belak zat² war- ia dapat meresap dengan baik.

Setelah ditjutji, mori itupun dikandji. Mak- udnja agar lilin yang melekat diatasnja ke- ak dapat lebih mudah terlepas apabila dike- ok ataupun digodog.

Untuk mendapatkan permukaan yang halus- gar mudah membatiknja, mori ini diperha- nis dengan mempergunakan "kemplongan",- kni mori itu dilipat atau digulung dan di- ukul² dengan dan diatas kaju. Djadi meng- aluskan mori tidaklah mempergunakan- rika.

5. Baru dimulai pemolaan atau membatik de- ngan lilin panas. Alat yang dipergunakan ia- lah "tjanting" apabila ditulis dengan tangan, atau "tjanting-tjap". Pekerdjaan membatik ini meliputi pekerdjaan²: nglowong, nerusi dan nembok.
6. Setelah selesai dibatik, ditjutji lagi untuk menghilangkan kandji pada tempat² yang akan diberi warna.
7. Mewarnai batik biasanja dilakukan dengan mentjelupkan kedalam tjairan warna atau bila warnanja sedikit, bisanja dilakukan de- ngan "mentjolet"nja.
8. Untuk memberikan warna lain lagi, setelah diwarnai untuk pertamakali tadi, kemudian bagian² yang akan diberi warna lain dike- ok lilinnja. Adapula yang kemudian menggog- nja hingga semua lilinnja terlepas.
9. Bagian² yang dikehendaki agar tetap putih dan bagian² lain yang tidak hendak ditum- pangi dengan warna lain kemudian² ditutup lagi dengan lilin. Untuk mendjaga agar lilin ini mudah terlepas, sebelumnja djuga harus dikandji terlebih dahulu. Dan selandjutnja ditjutji lagi.
10. Kemudian ditjelupkan kedalam warna lain- nja. Demikian pekerdjaan mewarnai ini da- pat dilakukan ber-ulang², tergantung dari banjaknja warna yang akan dipergunakan dalam batik tersebut.
11. Pekerdjaan terachir adalah menggodognja dalam air yang mendidih, hingga lilinnja ter- lepas seluruhnja. Untuk batik yang memper- gunakan soga tumbuhan, terlebih dahulu ha- rus melalui proses yang disebut "njareni".
12. Demikianlah batiknja telah selesai dikerdja- kan. Untuk perdagangan, batik² ini kemudi- an dikandji lagi dan dihaluskan dengan kam- plongan atau dipres, maksudnja ialah agar lebih tahan dalam penjinmanannya sebelum sampai kepada konsumen. Tapi ada pula ba- tik yang tidak dikandji lagi.

IV. PENGOLONGAN DAN TJIRI² KAIN BATIK.

Selera anda akan menentukan batik yang bertjorak dan warna bagaimana yang akan anda pilih.

Akan tetapi harus diketahui, bahwa kwalita- batik ada beberapa matjam yang tergantung dari- a.l. bahan baku yang dipergunakan (mori, zat pe- warnanja), pekerdjaannya dan nilai seninja.

1. Tjiri² chas dari batik.

Sebenarnya sehelai kain dapat dinamakan kain batik, apabila tjorak dan warna yang ter- dapat diatasnja tidak ditjetak dengan mesin setjara langsung, akan tetapi polanja terlebih dahulu haruslah ditulis dan atau ditjap dengan

lilin, baru kemudian diberi warna² dan terakhir digodog agar lilinnja terlepas seluruhnja.

Batik Indonesia Asli, baik tjorak maupun warnanja adalah sama pada keduabelah sisinja. Dewasa ini banjak batik² tiruan atau jang bukan b'kinan Indonesia, akan tetapi diberi merk buatan atau asli Indonesia, misalnja sadja tjorak dan warnanja ditjetak langsung dengan mesin atau pewarnanja hanja pada satu sisi sadja, seperti halnja batik² tiruan jang dibikin di Djepang, RRT dan Malaya misalnja.

2. Kwalita.

Kwalita (dan harganja djuga) akan tergantung dari beberapa hal pokok misalnja :

a. Proses pemolaan dengan lilin.

- Jang dibatik atau ditulis dengan tangan seluruhnja, akan djauh lebih unik dan tinggi nilai seninja. Karena untuk menyelesaikan sehelai kain batik dengan proses ini akan memakan waktu dari tiga hingga enam bulan.
- Jang ditjap dengan tjanting-tjap dibuat dari lembaran² tembaga berukuran 8" — 10". Untuk diketahui, dengan proses ini seorang peng-tjap satu harinja dapat menyelesaikan lima hingga limabelas helai kain batik, tergantung dari djenis tjapnja, alusan ataukah bukan.
- Kombinasi, yakni kombinasi antara ditjap dengan tjanting-tjap dan ditulis dengan tangan.

b. Bahan (mori) jang dipergunakan.

Mori jang dipergunakan seperti telah disebutkan diatas ialah mori dengan ukuran lebar "42". Mori ini terdiri dari beberapa kwalita sebagai berikut :

- * prisma
- * prima
- * biru
- * blatju grey

- halus sekali
- halus
- medium
- kasar.

Seseorang jang belum berpengalaman dalam hal batik akan sukar sekali membedakan batik mori mana jang dipergunakan.

c. Pengandjian.

Kain batik jang telah djadi, ada kalanja dikandji hingga kaku, tergantung kepada jang memprodukirnja. Karena maksud semula, kandji ini dipergunakan, agar waktu memperdagangkannja akan djadi lebih awet.

Akan tetapi, djustru karena pengandjian inilah, seseorang akan dapat terketjoh dalam hal kwalita mori ini. Karena mori kasar dan medium jang pada proses permula-

an "diketeli" dan pada achirnja tidak dikandji, akan terasa halus pula.

3. Pewarnaan.

Jang harus diingat ialah, bahwa di Indonesia terdapat dua matjam batik, yakni dengan warna tradisional (biru, merah, tjoklat) seperti batik² ala Jogjakarta, Surakarta, Banjarmasin dan Ponorogo dan batik² dengan warna² "modern" artinja jang mempergunakan warna lain ketjuali warna tradisional, seperti batik² Pelongan dan Djakarta. Hingga dengan demikian, harga tidaklah hanja tergantung pada warna² itu sadja, akan tetapi pada tinggi nilai seni batik jang terkandung dalam batik sendiri. Dan pada dewasa ini, telah banjak pola batik² keluaran Jogjakarta atau Surakarta jang telah mempergunakan warna² beraneka ragam, hingga orang menjebutnja dengan batik Jogja modern, Sala modern atau Barisan modern.

4. Tjorak.

Seperti halnja pada senilukis jang masih mempunyai gaja tersendiri, demikian pula tjorak batik ini mempunyai gajanja jang tersendiri pula.

Pada umumnja, penggambaran sesuatu benda dalam batik tidaklah setjara kenjataan akan tetapi mempergunakan tehnik garis² tersendiri jang chas batik.

Tambahan pula nama jang diberikan untuk suatu tjorak mempunyai arti magis atau simbolis. Misalnja sadja, ada batik jang disebut "Sidik Mukti", dari namanja maka si pentjipta mengharapkan, agar orang jang memakai batik tersebut akan benar² mendjadi sedjahtera.

Hingga oleh karenanja, pada adat kebiasaan di Djawa, pemakaian kain tersebut sangat djurkan kepada kedua mempelai sewaktu pernikahan atau bersanding.

Masih terlalu banjak arti² atau kias² tersimpul pada tiap² tjorak batik ini.

Berdasarkan pada dasar lukisan, susunan bentuk, motif² batik dapat diklasifisir dalam berapa golongan jang pada tiap² golongan termaksud mempunyai tjiri² jang sama atau samaan :

A. Golongan motif "geometris" :

Dalam golongan ini motif² batiknja mempunyai garis² pokok bangun² geometri (ukur) seperti lingkaran, segiempat, segitiga, bulattelur dan lain-lain.

Motif² jang termaksud dalam golongan ini ialah antara lain :

1. B a n d j i
2. T j e p l o k
3. G a n g o n g
4. K a w a n g
5. A n j a m a n

Golongan motif "Garis miring" :

Dalam golongan ini motif² disusun menurut garis² miring. Garis miring ini kearah tepi kain (membentuk sudut $\pm 45^\circ$ dan merupakan garis² djadjaran). Motif² jang termasuk golongan ini a.l. :

1. P a r a n g (barang, rusak, kusumo, batis, klitik dsb.nja)
2. U d h a n l i r i s
3. R u d j a k s e n t e .

Golongan motif "Semen" :

Gambar/lukisan² dalam motif ini penempatannja tidak seperti penempatan dalam motif² geometris atau garis miring, akan tetapi terserak (tersebar) beraturan, dan didalmnja terdapat ornamen jang melukiskan bumi (tanah), tanam²an (bunga², daun dsbinja) dan binatang (garuda/ular, burung, mendjangan dsb.nja). Jang termasuk dalam golongan ini menurut ornamennja dapat dibedakan a.l. :

1. Semen - dengan ornamen bunga dan daun
2. Semen - dengan ornamen bunga dan binatang
3. Semen - dengan ornamen bunga dan lar²-an atau garuda..

D. Golongan motif "Buketan" :

Dalam golo²ng ini motif²nja melukiskan tanaman atau sesuatu lainnja jang bentuknja pandjang, besar atau lengkap. Kadang² pula hanja bagian tepi kain sadja jang dihiasinja. Golongan ini sering disebut pula : "Lunglungan" (lung = pohon/tanaman mendjalar).

Kata "buket" kiranja jang dimaksud ialah "boufuet" = karangan bunga. Dalam golongan ini dapat dibedakan :

1. Terangbulan (biasanja bagian tengahnja/atasnja bjur atau kosong)
 2. Lunglungan (bjur/merata atau penuh).
- E. Dalam pada itu dapat pula dikemukakan dengan apa jang dinamakan "Tumpal", yakni hiasan jang berbentuk segitiga pandjang jang biasanja ditempatkan sebagai "kepala" pada ujung tepi kain pandjang. Pada sarung, tumpal ini sering pula penempatannja berhadapan sebagai hiasan pada bagian khusus jang tidak bermotif jang termasuk dalam golongan motif tersebut diatas. Bagian ini sering pula diisi dengan buketan.

SUTRISNO KIRDJAN.

SEBAGIAN DARI PROSES PEMBATIKAN



SEKITAR masalah S. P. P.

Oleh : Dr J. Panglaykim

TINDAKAN UNTUK MENDORONG EKSPOR.

Sudah kita ketahui bahwa sedjak tahun 1950 berbagai matjam dan bentuk perangsang telah diintroduksi oleh Pemerintah. Namanja ber-beda², ada dengan nama B.E., SIVA, ADO dsb. dan terakhir diberi nama **S.P.P.** (Surat Pendorong Produksi).

Pada tiap² tindakan baru diharapkan bahwa eksportir akan diberi perangsang untuk melaksanakan exportdrive. Dapat dikatakan bahwa tiap² bentuk perangsang yang dinjatakan berlaku, telah memberikan dorongan pada para eksportir. Akan tetapi djangka waktunja terbatas. Suatu bentuk perangsang yang pada permulaan merupakan suatu perangsang, setelah suatu djangka waktu tertentu tidak dapat dianggap lagi sebagai suatu pendorong ekspor. Disparita antara harga pasar dalam negeri dan hasil wissel (hasil dalam bentuk devisa dll.) selalu mengikuti ladjunja inflasi. Dan praktek disparita ini makin lama makin besar.

Oleh karena itu pada waktu SPP diintroduksi sebagai sistim pendorong ekspor yang baru, beberapa golongan tertentu tidak dapat menjetudju. Salah satu alasanja adalah bahwa SPP adalah suatu langkah mundur dan tidak akan merupakan tindakan yang sementara sadja. Semua ini benar, akan tetapi alternatif apakah yang mereka berikan. Alternatif yang difikirkan adalah langkah² pada suatu planned economy, seperti yang dikenal di RRT. Dus bukan yang Sosialisme ala Indonesia, walaupun dari kata²nja tidak akan dapat terbatasja.

Akan tetapi dewasa ini, kita dihadapi dengan suatu masalah (issue) atas para eksportir (negara maupun swasta).

Djadi apa yang kami akan adjukan disini hanja merupakan suatu pembahasan **jang mempunja nilai terbatas.**

I. SPP GAJA LAMA (Sebelum 12 Djuli 1965).

SPP Gaja Lama merupakan suatu hak impor dan berdjumlah 20% dan 5% untuk eksportir produsen. SPP untuk produsen hampir tidak dilaksanakan. SPP (20%) oleh para eksportir diperdjual-belikan dalam pasar bebas. Berbagai matjam sistim dipergunakan oleh para eksportir.

SPP EKSPORTIR.

Adakalanja yang mendjadi perantara adalah sebuah bank swasta, dan telah memberikan kre-

dit ekspor serta djuga memberikan kredit impor. Si eksportir yang memperoleh kredit dari Bank A dapat meminta perantara Bank A itu untuk mendjualkan SPP-nja pada importir X. Kadang Bank²-pun turut serta dalam importir X. Sering kali pemberian kredit pada importir Y itu resminja melalui bukunja sebagai suatu kredit, akan tetapi dalam prakteknja adalah suatu "profit sharing deal".

Ada djuga para eksportir yang mendjual SPP ini langsung pada para importir yang sudah mempunjai relasi, kadang² oleh importir ini dibayar persekot.

Ada golongan yang menspesialisir diri dalam membeli SPP, akan tetapi pembelian² tidak diperuntukkan impor. Mereka hanja mengambil kesempatan bila kurs² meningkat. Dengan sedjumlah yang mereka miliki, mereka dapat menguasai sedjumlah SPP dan mendjualnja ini pada para importir.

Umumnja djual-beli SPP dilakukan atas dasar indent, dan kursnja ditentukan atas dasar pasar. SPP eksportir tiap hari mempunjai notering dan ini ditentukan oleh suatu pasar babas.

Djual-beli dapat dilakukan tiap saat, tidak ada suatu gedung, tiada ada peraturan yang mengikat. Djual-beli dilakukan oleh tiap eksportir pada siapa sadja yang bersedia membelinja. Turn-over adalah dalam tangan sendiri, dan tidak ditentukan oleh suatu badan resmi. Demikia impornja dengan adanja SPP sudah dapat dibuka L/C oleh importir melalui salah satu Bank devisa.

Pada pokoknja instansi yang harus dilibatkan untuk diminta tanda tangan minimum sekali, sehingga djauh terlebih dahulu dapat diadakan rencana pembelian diluar negeri. Dengan demikia penyelesaian impor melalui SPP adalah djauh lebih mudah dan singkat daripada impor melalui RIB, karena sebagian terbesar dari penentuan "timing" adalah dalam tangan pengusaha, dan umumnja mereka berusaha untuk memperoleh **turn-over yang tjepat serta kontinu.**

(1). ASPEK FINANSIERING

SPP Gaja Lama pada pokoknja dapat menarik sebagian dari uang yang beredar diluar sistim perbankan (unorganized money sector). Dengan sistim yang tidak terlalu formil, dengan adanya sistim indent (dasarnya daripada sistim indent adalah kepertjajaan), mereka telah dapat menjat dot uang dari pasar bebas.

Turn-over jang mereka peroleh dari sistim yang tidak formil, tanpa terlalu banjak mata rantai dalam birokrasi, adalah djauh lebih tinggi dan jumlah uang jang dapat ditarik dari pasar adalah agak lumayan. Katakan sadja bahwa tiap bulan dapat diimpor l.k. US \$ 60 djuta. Ini berarti bahwa tiap bulan dapat ditarik dari bidang impor dan bidang ekspor uang sedjumlah 60 djuta × 3.000,— = l.k. Rp. 180,— miljard.

ASPEK DEvisa.

Dengan adanya kemungkinan menarik sejumlah uang dari pasar bebas, maka turn-over mereka dapat dikatakan lebih tjepat bilamana dibandingkan dengan sistim SPP Gaja Baru. Katakan sadja bahwa tiap eksportir dapat mengekspor 10 kali US. \$. 25.000,—. Bilamana mereka dapat memutarakan uangnja dengan tjepat (dan ini mungkin karena mempunyai excess pada pasar yang bebas) maka ada kemungkinan turn-over mereka adalah 10 kali satu tahun, djadi akan menghasilkan devisa sebesar US. \$. 250.000,—, sedangkan mungkin sekali dengan sistim SPP Gaja Baru, turn-over-nja tidak akan melebihi lima misalnja, maka jang akan diterima adalah US. \$. 185.000,—. Bilamana ini diperhitungkan untuk tiap eksportir maka dapat kita lihat impact-nya pada export drive.

Djadi dengan demikian mempergunakan sistim penarikan uang dari pasar bebas telah memungkinkan eksportir untuk menjumbangkan lebih banjak devisa daripada sistim SPP Gaja Baru. Alasannja nanti kami bahas bilamana kami akan pada peneropongan SPP Gaja Baru.

ASPEK "FLOW OF GOODS".

Nampaknja dalam praktek para industriawan yang mempunyai organisasi tidak lagi ingin mengutamakan diri pada "Luimen" petugas dalam birokrasi. Bilamana mereka menjerahkan nasibnja mereka akan berdjalan. Bukan memperlemah semangat dan loyalita pegawai-pegawainja. Masebagian daripada mereka mengambil sebagai kesempatan untuk terus menggunakan kesempatan yang nbeli SPP untuk menutup kebutuhan mereka akan bahan² mentah.

Berhubung adanya pengusaha²/usahawan² yang pada pokoknja terus menerus memperhatikan turn-over jang tjepat, maka adalah bagi ketjinginan mereka adalah untuk dapat menjedjia barang² setjara teratur dan kontinu serta dalam waktu jang tjepat. Turn-over jang tjepat adalah kepentingan mereka sendiri.

Selanjutnja perlu diperhatikan bahwa programnja sederhana sekali. Maka dengan memperkecil faktor² diatas SPP lama nampaknja telah memberikan suatu djaminan minimum pada para industriawan/usahawan akan kontinuita penjaluran² kebutuhan mereka. Dengan demikian flow of goods dengan adanya SPP lama nampaknja akan terdjamin, dan memperoleh sambutan konkrit dari sektor produktif.

(4). APAKAH JANG TELAH DIIMPOR (SPP GAJA LAMA).

Jang diimpor menurut SPP Gaja Lama selama tahun 1964 adalah sedjumlah Rp. 19 miljard, sedangkan dalam tahun 1965 sampai dengan bulan Mei adalah sebesar Rp. 10 miljard.

Katakan sadja djumlah seluruhnja jang diimpor adalah sebesar Rp. 30,— miljard selama 1½ tahun. Sedangkan jang diimpor dengan sistim Pernyataan Impor (PI) dalam tahun 1964 adalah sebesar Rp. 1,— miljard sadja. Jang diimpor menurut prosedur biasa (RIB) dalam tahun 1964 adalah sebesar Rp. 19 miljard dan dalam tahun 1965 (Mei) mendekati Rp. 8 miljard selama 1½ tahun.

Dari angka² diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa djumlah impor jang dilakukan atas dasar SPP Gaja Lama adalah melebihi impor atas dasar RIB (dengan harga resmi Pemerintah).

Dari spesifikasi impor (dengan SPP) dapat kita lihat bahwa dalam tahun 1964 kurang lebih diimpor bahan konsumsi sebesar Rp. 5 miljard, bahan baku Rp. 7 miljard, dan barang modal sebesar Rp. 7 miljard, sedangkan angka tersebut untuk tahun 1965 (Mei) adalah masing² Rp. 3,— miljard, Rp. 3,5 miljard dan Rp. 3,5 miljard.

Dari djumlah sebesar k.l. 30 miljard Rp. telah diimpor barang² seperti :

- (1). Tekstil Rp. 6,8 miljard.
- (2). Tjengkeh Rp. 1,— miljard.
- (3). Benang Tenun Rp. 846 djuta.
- (4). Besi Beton Rp. 748 djuta.
- (5). Cambrics (untuk batik) Rp. 419 djuta.
- (6). Tepung Terigu Rp. 397 djuta.
- (7). Tjap² Kimia Rp. 257 djuta.
- (8). Semen Rp. 130 djuta.
- (9). Barang² lain jang tidak dispesifisir lebih lanjut sedjumlah Rp. 18, miljard (termasuk barang² modal sebesar kurang lebih Rp. 11,— miljard). Lain²nja dibawah seratus djuta Rp.

Dari spesifikasi diatas dapat kita menarik kesimpulan bahwa walaupun djumlah matjam barang² agak terbatas dalam variasijnja namun memberikan kesan adanya usaha² untuk menutup kekurangan akan bahan mentah.

(5). ASPEK INCENTIVE.

Sudah merupakan suatu kenjataan bahwa disparitas jang telah dialami oleh para Eksportir telah dapat dikompensir dengan harga SPP jang diperdjual-belikan dalam pasar bebas. Djadi dalam prakteknja, bilamana mereka harus mengekspor sesuatu matjam barang dengan sesuatu kalkulasi baru dan dapat menjapai break even point dengan suatu kurs SPP setingkat 40 (satu US \$ = Rp. 10.000,—), maka kurs inilah jang mereka pasang dalam menawarkan SPP pada tja-lon Importir. Karena sebagian terbesar dari

Eksportir membeli barangnja dari pasar dalam negeri, maka harga pokok mereka umumnja tidak berbeda banjak. Terketjuali Produsen Eksportir jang mempunjai perkebunan sendiri, seperti PPN dan sebagainya. Harga pokok Produsen Eksportir inj sudah tentu djauh lebih rendah dari pada Eksportir jang membelinja dari pasar.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa umumnja sebagian terbesar dari Eksportir akan datang dipasar dengan menawarkan SPP-nja lebih tinggi dari 40. Bilamana disparita meningkat, maka SPP jang selandjutnja akan ditawarkan sudah tentu akan mengikuti kurs jang baru. Importir jang harus membeli SPP ini masih tentu akan mengadakan suatu kalkulasi barang apakah jang masih tjotjok dengan suatu kurs tertentu. Menurut beberapa keterangan jang kami peroleh (sebelum 14 Djuli), ada barang² jang masih tjotjok dengan suatu kurs SPP setinggi 60 sampai 75. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan kurs setinggi enam puluh masih akan dapat suatu golongan Importir jang dapat membelinja. Seringkali Eksportir jang tjukup kuat keuangannja akan turut serta dalam deal impor tersebut.

Dengan keterangan diatas ternjata ada suatu mekanisme jang agak otomatis dalam menampung disparita jang terus meningkat sebagai akibat dari pada kelangsungan inflasi. Built in mechanism ini diberikan oleh SPP jang didjual dan dipergunakan setjara bebas oleh para Industriawan dan Usahawan.

Sistim ini adalah objektif dalam arti bahwa tidak terlalu banjak petugas dalam birokrasi jang dapat menarik keuntungan pribadi tanpa banjak memberikan djasa atau kepintaran.

Dengan perkataan lain perhitungan atas dasar keadaan sebelumnja 14 Djuli menundjukkan bahwa paling sedikitnja Eksportir harus dapat mentjapai suatu kurs setinggi 40/45 untuk dapat menerima kembali harga pokoknja. Dengan disparita jang berada disekitar kurs SPP 40/45, peraturan SPP Gaja-Baru merupakan suatu "pukulan" untuk para Eksportir.

Mari kita sekarang meneropong SPP Gaja-Baru.

(6). S.P.P. BANK INDONESIA.

Disamping SPP Eksportir kita djuga harus memperhitungkan adanya SPP Bank Indonesia (B.N.I. Unit I). Pada pokoknja SPP Bank Indonesia adalah SPP tjiptaan Bank Indonesia, dus in principe adalah pendjualan devisa atas dasar kurs SPP jang didjual menurut kurs ekwasi melalui call seminggu satu kali di Bank Indonesia.

SPP Bank Indonesia pada permulaannja ada jang diberi nama SPP Umum dan SPP Khusus. SPP Umum dapat digunakan untuk barang² jang dispesifisir dalam golongan I, II dan III, sedangkan SPP Khusus hanya diperuntukkan barang²

jang sudah ditjantumkan terlebih dahulu, misalnya untuk bahan² tjat kimia, barang tenun dan sebagainya.

Kurs SPP Bank Indonesia dalam prakteknja djauh lebih murah dari SPP Eksportir jang diperdjual-belikan dipasar bebas.

Kadang² perbedaannja adalah sampai enam. Ada sebagian dari pada pengusaha jang mempunjai relasi baik dengan Bank² menggunakan saluran ini. Perbedaan kurs enam ini adalah tjukup menarik bagi mereka karena bilamana mereka sudah mendapatkannja, SPP ini dapat ditawarkan dipasaran bebas. Akan tetapi untuk memperoleh bagian dari call SPP Bank Indonesia ini se-olah² seperti menunggu menarik lotre.

Hanja dengan menggunakan uang atau fasilitas bank (kadang² tidak perlu menjeter, hanja bajar bunga sadja) golongan² tertentu ikut sert dalam call. Sampai pernah terdjadi bahwa pada suatu hari jang ikutserta dalam call djumlahnja demikian tingginja, sehingga kalau tidak salaj mentjapai djumlah Rp. 51 miljard. Ternjata bahwa sebagian terbesar dari djumlah tersebut dimasukkkan oleh Bank² Negara; mungkin suatu kerdjasa-sama erat dengan dunia pengusaha jang mendjadikan SPP sebagai objek spekulasi.

Djuga SPP dari PPN seringkali mendjad objek dari pada pengusaha. Aspek spekulasi selalu ditondjol-tondjolkkan. Dalam situasi sekarang dimana supply akan devisa (kebutuhan industri dan sebagainya) adalah tinggi sekali, maka tidak mungkin kita dapat menghilangkan aspek spekulasi ini. Jang dapat kita lakukan hanja dalam batas² tertentu turut mengendalikannja bukan dengan peraturan², hukuman dan sebagainya, aka tetapi dengan tindakan Ekonomis jang rasional serta dengan perhitungan.

II. S.P.P. GAJA BARU.

S.P.P. Gaja Baru timbul karena (salah satu alasan) banjak sekali ketjaman dilontarkan pada aspek spekulasi sadja. Aspek² positif jang lain tidak disinggung. Betul SPP bukan suatu tjat jang ideal, akan tetapi dalam situasi sekarang dimana ada suatu economic leadership maka tidak akan dalam bentuk apapun tidak akan berhasil karena inflasi belum diganjang.

Djadi para petugas jang tiap hari dirongrong oleh harian² dan dituduh² merasa dirinja kurang enak, sehingga dengan adanya tekanan-tekanan jang kuat ini, SPP gaja baru telah dilahirkan dengan beberapa modifikasi setelah peraturan umumnja pada bulan Djuli 1965.

(1) Pokok² S.P.P. Gaja baru.

S.P.P. Eksportir tidak ada lagi. Semua SPP harus disetorkan pada Bank Indonesia B.I. (sekarang Bank Negara Indonesia Unit I) akan melamparkannja dalam suatu Bursa. Hanja produsen Eksportir dapat menggunakan S.P.P. njang ini hanja terbatas pada kebutuhan² mereka

di dalam bentuk bahan² mentah. Kemudian juga dapat dibatasi pula. PNN walaupun bukan produsen importir diperkenankan masuk dalam l. Tudjuannya adalah agar produsen yang ke- dan menengah (dan kurang kuat dalam modal rdja) memperoleh bahan-bahan mentahnya.

Perbedaannya dengan SPP gaja lama adalah : SPP harus disetor pada Bank Negara Indonesia Unit I ketjuali Produsen Eksportir (terbatas pada kebutuhan sendiri) ;

Para pembeli terbatas pada Produsen Importir, serta P.N.N. ;

Call dilakukan tiap² minggu satu kali ;

Financierung Rupiah baru akan dapat dikembalikan setelah selesai pendjualan (dalam praktek memakan waktu l.k. satu bulan) ; ada kemungkinan menerima segera, akan tetapi harus dipotong beberapa point oleh Bank Negara Indonesia.

Pengaruhnja pada Kurs.

Dengan terbatasnja para pembeli dan dirnjnja pendjualan SPP melalui call, dan dengan ak adanya SPP dipasar bebas, maka kurs SPP ak dapat mentjapai tingkat jang menutup disita para eksportir.

Sebagai ilustrasi kita mengadakan suatu simulasi jang dilakukan oleh seorang eksportir kira-kira² 9 Agustus sampai 14 Agustus :

a. Sheets I

Harga pasar Sheets ditaksir Rp. 1.500 per kg. as dasar kurs SPP 30 (Rp. 7.500,—) dengan mudian memperhitungkan adanya overprice mereka dapat djual dengan kurs Rp. 10.000 per (\$.), maka mereka akan menerima kembali serara keseluruhan dalam rupiah per kg. Rp. 1.018,—.

b. Sheets III

Atas harga pasar per kg. Rp. 1.450,—, mereka akan menerima kembali setjara keseluruhan : kg. Rp. 1.142,—.

c. Blanket D.

Harga pasar waktu itu adalah kirakira . 725,— per kg. Hasil ekspor bilamana diper- ungtkan semua akan diterima sebesar Rp. 567,— da waktu bulan Agustus 1965 kurs call SPP lah setinggi 28.

Dapat dibayangkan disparita jang harus dide- ole eksportir bilamana dengan kurs 30 sadja lah diderita disparita jang demikian tingginja. um bilamana kita perhitungkan djumlah uang g beredar itu berputar dengan suatu ketje- an jang agak tinggi. Penambahan dalam bulan ili adalah sebesar Rp. 130,— miljard, bulan ustus Rp. 114,— miljard, September mungkin ak kurang, dsb., sehingga menurut keterangan a achir Sept. 1965 djumlah uang jang beredar ah mendekati Rp. 1.600,— miljard, dibanding- a dengan Rp. 676,— miljard pada achir tahun

1964. Dus suatu peningkatan jang mendekati 3 kali dari djumlah achir tahun 1964.

(3) Pengaruh pada turn-over/financierung flow of goods.

Karena SPP Gaja Baru tidak dapat didjual dalam pasar bebas serta terbatas pada satu kali call satu minggu melalui Bank Indonesia, maka turnoverja akan djauh lebih kurang dari pada SPP Gaja Lama. Sebelum afrekening dapat di- selesaikan, paling sedikitnja dibutuhkan waktu satu bulan dibandingkan dengan satu hari dipa- sar bebas. Belum diperhitungkan kurs jang ren- dah itu. Sehingga ekspor tidak mempunjai pe- rangsang tjukup, dan dengan demikian pengha- silan devisa menurun.

Dengan terbatasnja peserta dalam call, flow of goods akan dipengaruhi sekali, Kontinuita industri jang biasa membeli SPP agak terganggu. Menurut keterangan sebagian terbesar industri tekstil akan tidak lagi mempunjai benang tenun pada achir tahun ini. Belum diperhitungkan ba- han² baku lain. Industri² jang membutuhkan ba- han baku ini harus ikut dalam call SPP jang pa- da achir tahun ini. Belum diperhitungkan bahan² baku lain. Industri² jang membutuhkan bahan baku ini harus ikut dalam call SPP jang pada prakteknja merupakan suatu tebakan lotre. Dari lima/enam kali ikut menebak, mungkin tidak akan memperolehnja. Djadi faktor onzekerheid ini akan mempengaruhi sekali kontinuita flow of goods, disamping djumlah jang tersedia akan djauh lebih rendah daripada dengan sistim SPP gaja lama dimana eksportir dan importir mem- punjai kepentingan langsung untuk mempertjepat perputaran operasinja.

Dengan perkataan lain SPP gaja baru walau- pun telah memperketjil hasrat spekulasi pada SPP, telah mengakibatkan adanya kemunduran dalam kapasita penghasilan devisa, serta dapat mengganggu kelantjaraan flow of goods.

III. PEMIKIRAN² MENGHAPUSKAN SPP.

Sedjak bulan Agustus 1965 timbul gagasan untuk menghapuskan SPP. Sebagian jang hend- ak menghapuskan SPP, hendak menghapuskan namanja SPP dengan mengintroduksikan nama lain. Dus pada pokoknja tidak akan membawa pe- njelesaian. Ada pula jang hendak menghapuskan SPP dengan tidak lagi memberikan pemberian hak impor.

Pandangan pertama jang hendak mengganti nama SPP dengan nama DPP misalnja (Devisa Pendorong Produksi) pada dasarnya hanja akan mempertinggi persentasi jang disediakan sebagai hak impor. Dan persentasi ini, selama pendjualan- nja masih harus dilakukan melalui Call, tidak akan membawa penjelesaian. Mungkin hanja akan memberi keringanan untuk k.l. satu bulan. Selan- djutnja suatu keputusan jang demikian adalah keputusan Kabinet dan dengan memperhitungkan

kan keacuan organisasi Kabinet akan memakan banyak waktu sebelum dapat diputuskan serta akan menimbulkan berbagai matjam interpretasi dan kebotjoran yang sudah telah tidak dapat dihindarkan.

Gagasan lain adalah bahwa kepada para eksportir diberikan sadja rupiah.

Pada eksportir akan dibayar harga pokoknja, serta mungkin keuntungan.

Mungkin pula diberikan bonus dalam bentuk devisa. katakan sadja $\frac{2}{3}\%$.

Gagasan ini berarti bahwa pemerintah menanggung disparita yang akan diderita. Katakan sadja ekspor kita adalah sebesar US \$ 500 djuta \times 2.000, dan disparita rata-rata adalah 30% maka pemerintah harus memberikan subsidi sebesar Rp. 300 miljard.

Apakah ini dapat dipertanggung djawabkan dengan meningkatnja inflasi dan defisit dewasa ini? Siapakah yang harus menentukan harga pembelian dalam negeri, bagaimana menentukan disparita ini?

Untuk dapat mengorganisir ini sudah tentu harus ada suatu badan mempunyai wewenang dengan segera kepada para eksportir, menentukan disparita yang harus dibayar oleh pemerintah dsb. Apakah ada organisasi yang dapat menampung pekerdjaan yang meminta keachlian yang khusus ini? Belum diperhitungkan petugas yang harus dapat bertindak djudjur dalam menentukan harga.

Dapat terdjadi suatu agreement dengan para eksportir. Katakan sadja harga ditentukan Rp. 2.000,—, sedangkan kwitansipun Rp. 2.000,—, akan tetapi yang diterima oleh eksportir adalah Rp. 1.900,— sedangkan yang Rp. 100,— masuk sebagai "disguised income" para petugas. Dan semua ini harus dilakukan tiap tempat yang dapat mengekspor. Dalam praktek sulit sekali, kalau tidak "onmogelijk" mentjiptakan suatu aparat kontrol yang demikian luasnja.

Maka dilihat dari sudut pelaksanaan pengkonsentrasian ekspor dengan pembayaran dalam rupiah pada eksportir akan ternjata sementara tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Belum diperhitungkan apakah eksportir akan tetap bersedia untuk bekerdja dalam kondisi yang baru kita gambarkan.

IV. Kesimpulan.

Bilamana perekonomian kita belum dapat diapproach setjara menjeluruh, dan bilamana kita belum mendapat tindakan yang prinsipil terbaru telah memberikan indikasi akan menurunnja penghasilan devisa. Penurunan devisa ini antara lain disebabkan oleh kurs SPP (melalui call) yang tidak memberikan kembali modal dari eksportir walaupun DPA/harga pasar uang Dollar meningkat. Disamping kurs ini, mekanisme yang lebih memberikan "adjustment" seperti pendjualan SPP gaja lama tidak diperkenankan. Djustru dalam bentuk ini financiering yang disedot dari luar sistim perbankan dapat mempertjepat perputaran operasi eksportir/importir.

Ini dapat memberikan perangsang kepada eksportir untuk mempertjepat / mempertinggi turn-over mereka dalam ekspor. Dengan mempertinggi turn-over mereka maka dalam kenjataan dan setjara konkrit akan lebih banyak devisa yang tersedia untuk digunakan oleh pemerintah. Disamping devisa sebesar 80% yang dapat digunakan oleh Pemerintah, para importir djuga dapat mempergunakan sebagian dalam bentuk SPP sebesar 20%. Dengan adanya mekanisme yang memungkinkan mereka membeli ini dari eksportir yang mereka anggap bonafide, dan membelanjanya langsung tanpa mata rantai birokrasi, pelaksanaan impor telah ternjata diselenggarakan dengan djauh lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan impor RIB.

Dengan devisa yang terbatas itu sudah ternjata bahwa prosedur yang terlalu berbelit-djustru akan menghambat kelantaran flow of goods. Djustru SPP Gaja Lama nampaknja telah memberikan indikasi bahwa industriawan paling mendikitnja terdjamin akan bahan-bakunja, serta dengan demikian dapat mengarahkan semua financieringnja pada persediaan bahan baku. Mereka yang telah menggunakan kesempatan ini tidak akan terlalu mengalami kekurangan akan bahan mentah pada achir tahun. Akan tetapi mereka yang tidak menggunakan kesempatan ini akan tidak lagi dapat memproduksi pada achir tahun karena mereka menunggu sadja pada djatah Pemerintah. Umumnja ini adalah perusahaan-perusahaan, industri swasta ketjil dan menengah.

Sudah tentu sistim SPP Gaja Lama dalam praktek memberikan lebih banyak kesempatan pada pemegang uang diluar sistim perbankan untuk mengontrol sektor industri. Sedjak dahulu sistim ini telah dipraktekkan dan mereka yang mempunyai excess pada pasar uang diluar bank system adalah mereka yang dapat dikatakan sebagai entrepreneur yang bersedia mengambil risiko. Sistim kita belum diubah setjara prinsipil. Selama ini belum dapat dilakukan maka sebaiknya kita memberikan kesempatan pada mereka untuk bekerdja disamping diadakannja berbagai tindakan untuk menandingi mereka, seperti halnya dengan memberikan kredit atas dasar produksi. Dalam memberikan kredit atas dasar proses produksi, perlu djuga kita ketahui bahwa umumnya mereka menguasai industri dan mereka yang menguasai industri dan mereka yang menguasai pasar uang diluar banking system seringkali adalah satu group.

Kelemahan daripada adanya pengontrolan pasar uang atas industri adalah kenjataan. Maka tugas kita adalah melemahkan radja yang ini dan ini baru mungkin bilamana kita sudah dapat memerangi inflasi. Memerangi inflasi baru dapat diselenggarakan bilamana ada suatu economic leadership yang setjara competent dan berwenang menelorkan integrated economic policy dalam bidang produksi, perdagangan luar/dalam negeri, pengangkutan, komunikasi, dsb. keuangan dan politik luar negeri. (Djakarta, 8 Nopember 1953)

Perubahan Tugas, Fungsi Serta Susunan Organisasi Komando Operasi Tertinggi

Keputusan Presiden Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No. 345 tahun 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

menimbang :

1. Bahwa untuk lebih melantjarkan pelaksanaan Revolusi, perlu disempurnakan kesatuan Komando Revolusi pada umumnya dengan menindjau dan menertibkan kembali susunan lembaga² Komando yang ada;
2. Bahwa untuk maksud diatas perlu mengintegrasikan seluruh Komando perdjungan maupun komando tugas dibawah Komando Operasi Tertinggi yang dipimpin langsung oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi;
3. Bahwa berkenaan dengan pertimbangan diatas perlu adanja reorganisasi dan reformasi pada susunan tugas Komando Operasi Tertinggi khususnja dan lembaga² Komando lain pada umumnya, disesuaikan dengan urgensi perdjungan.

meningat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 Undang² Dasar Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 142 tahun 1963 tanggal 19 Djuli 1963;
3. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No. 44/KOTI/1963 tanggal 16 Nopember 1963.

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

terutama :

Menjempurnakan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 142 tahun 1963 tanggal 19 Djuli 1963 tentang Pembentukan, Tugas dan Fungsi Komando Operasi Tertinggi, serta Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No. 44/KOTI/1963 tanggal 16 Nopember 1963 tentang Organisasi dan Tatakerja Komando Operasi Tertinggi.

edua :

Berlakunjanya perubahan tugas, fungsi serta susunan organisasi Komando Operasi Tertinggi sebagai berikut :

Pasal 1.

KEDUDUKAN

Komando Operasi Tertinggi, disingkat KOTI adalah sebuah Lembaga Revolusi dan Pemerintah

Tertinggi, yang merupakan alat eksekutif Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi dalam rangka pelaksanaan program² Revolusi menurut urgensi perdjungan dimana diperlukan pengerahan dari pada segala potensi Nasional.

Pasal 2.

KOTI bertugas pokok melantjarkan operasi untuk mempertjepat tertjapainja ketiga kerangka tujuan Revolusi.

Pasal 3.

FUNGSI

Komando Operasi Tertinggi mempunyai fungsi mendjalankan Komando Tertinggi terhadap segala pelaksanaan perdjungan dan program Pemerintah, dalam arti memberikan pimpinan kebijaksanaan koordinasi pelaksanaan serta pengawasan terhadap semua aparatur Revolusi.

Pasal 4.

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Komando Operasi Tertinggi dipimpin langsung oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi dengan sebutan Panglima Besar (PANGSAR) KOTI, dibantu oleh para Wakil Perdana Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pimpinan Komando, Panglima Besar KOTI dibantu oleh :
 1. Wakil Panglima Besar Umum;
 2. Wakil Panglima Besar Urusan Militer;
 3. Wakil Panglima Besar Urusan Ekonomi;
 4. Wakil Panglima Besar Urusan Sosial/Politik;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari² Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Panglima Besar KOTI dibantu oleh Staf Komando yang dipimpin oleh seorang Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi.

Staf Komando Operasi Tertinggi terdiri :

1. Staf Gabungan 1 (Intellidjen);
2. Staf Gabungan 2 (Operasi);
3. Staf Gabungan 3 (Pengerahan Tenaga);
4. Staf Gabungan 4 (Logistik);
5. Staf Gabungan 5 (Sosial Politik);
6. Staf Gabungan 6 (Moneter);
7. Staf Gabungan 7 (Ekonomi);
8. Sekretariat Umum.
9. Seksi Penerangan.

Pasal 5.

Kompartimen/Departemen tetap mendjalankan fungsinya masing², dalam susunan KOTI pada Menteri Koordinator dan Menteri menjadi Staf Khusus dan penasehat dalam bidangnya masing².

Pasal 6.

Sesuai kebutuhan Operasi akan dibentuk Komando² Utama sebagai pelaksanaan KOTI, berdasarkan Keputusan ini.

Ketiga :

Segala sesuatu mengenai pelaksanaan, pengembangan perubahan Organisasi dan Tatakerja KOTI diatur dengan atau berdasarkan Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Panglima Besar KOTI.

Keempat :

Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Presiden Republik Indonesia No.

142 Tahun 1963 tanggal 19 Djuli 1963 dan Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No. 44/KOTI/1963 tanggal 1 Nopember 1963 disesuaikan dengan Keputusan ini.

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta.

Pada tanggal 12 Nopember 1965.

Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi

t. t. d.

S U K A R N O.

PEMBUBARAN KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 368 TAHUN 1965

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 345 tahun 1965 tentang perubahan tugas, fungsi serta susunan organisasi Komando Operasi Tertinggi dan Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No. 162/KOTI/1965 tentang Penetapan Komando-Komando Utama sebagai Komando-Komando Pelaksana Komando Operasi Tertinggi perlu membubarkan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi ;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 70/KOTOE/tahun 1965 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 345 tahun 1965 ;
3. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No. 161/KOTI/1965 ;
4. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No. 162/KOTI/1965 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Membubarkan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.

KEDUA :

Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota dan petugas Komando Tertinggi Operasi Ekonomi sedjak pada tanggal berlakunya keputusan ini dan mengembalikan mereka kepada kesatuan/Departemen asal masing-masing dengan disertai utjapan terimakasih atas segala sumbangan yang telah diberikan selama ini kepada Komando Tertinggi Operasi Ekonomi.

KETIGA :

Ketentuan-Ketentuan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi yang masih harus diselesaikan atau dilaksanakan akan ditentukan oleh Presidium Kabinet Dwikora.

KEEMPAT :

Dengan tidak menjimpang daripada ketentuan keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No. 161/KOTI/1965 berhubungan dengan Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No. 162/KOTI/1965 maka penjelesaian segala sesuatu yang berhubungan dengan pembubaran Komando Tertinggi Operasi Ekonomi ini diatur oleh Presidium.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1965.

Dikeluarkan di Djakarta

pada tanggal 30 Nopember 1965

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t. t. d.

S U K A R N O

Ketentuan² tentang pengimporan barang² untuk projek-projek

Djuru Bitjara Departemen Luar Negeri pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 1965, telah mengumumkan ketentuan² mengenai pengimporan barang² untuk projek² yang dibangun dengan kredit atas dasar Production Sharing sebagai berikut :

Menunjuk pada Pengumuman Biro Lalu Lintas Devisa No. 1/PS/BLLD/65, tanggal 23 Maret 1965 dan 2/PS/BLLD/65 tanggal 5 Juli 1965 perihal tersebut diatas dan telah musjawarah dalam Panitia Tehnis Production Sharing (P.T.S.) antara P.T.P.S. dengan wakil² Departemen Perdagangan Luar Negeri, B.L.L.D. dan Direktorat Jenderal Bea & Tjukai, maka dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri I dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Menteri Urusan Kredit Luar Negeri atas dasar Production Sharing, maka B.L.L.D. mengeluarkan „Surat Izin Pemasukan Barang²“.

Izin Pemasukan Barang tersebut diatas akan diberikan atas permintaan peserta Indonesia melalui P.T.P.S.

Permintaan Izin itu harus disertai uraian yang cukup jelas tentang barang² yang akan diimpor.

Izin Pemasukan Barang setjara „umum“ dalam rangka Production Sharing dibuat dalam rangkap 12 :

- a. Lembar asli untuk peserta Indonesia.
- b. Lembar ke - 2 dan ke - 3 untuk P.T.P.S.
- c. Lembar ke - 4 untuk Direktorat Impor.
- d. Lembar ke - 5 untuk Direktorat Djendral Bea dan Tjukai.
- e. Lembar ke - 6 s/d 12 untuk Divisi² yang bersangkutan di B.L.L.D.

Purchase Order (P.O.) harus dikirim sedikit-dikitnja dalam rangka enam dan uraian barang beserta harga satuannya harus cukup jelas sehingga memungkinkan dilakukannya pemeriksaan harga oleh B.L.L.D.

6. Izin B.L.L.D. hanya akan diberikan :

- a. apabila perintjian harga, uraian barang cukup jelas dan harga dalam purchase order tersebut dapat diterima.
- b. apabila uraian barang dan harga satuannya tidak jelas sehingga barang² tersebut tidak dapat diperiksa, maka izin pemasukan akan disertai dengan syarat : „Harga barang² harus diperiksa dan mendapat persetujuan dari Perwakilan B.L.L.D. di atau K.B.R.I. di dengan catatan bahwa jenis barang tidak menjimpang dari daftar barang² yang telah disetujui oleh P.T.P.S.“

7. Persetujuan terhadap P.O. berbentuk suatu tatanan pada lembar² P.O.

- a. Lembar ke - 1 untuk P.T.P.S.
- b. Lembar ke - 2 untuk Peserta Indonesia melalui P.T.P.S.
- c. Lembar ke - 3 untuk Peserta Luar Negeri melalui P.T.P.S.
- d. Lembar ke - 4 untuk B.L.L.D.
- e. Lembar ke - 5 untuk Direktorat Impor.
- f. Lembar ke - 6 untuk Direktorat Djendral Bea & Tjukai.

8. Baik pada K.P.P. tetap maupun K.P.P. Barang harus disebutkan nomor dan tanggal P.O. yang telah disetujui.

9. Apabila ternyata pada daftar barang² pada K.P.P. terdapat barang² yang tidak sesuai dengan syarat² dan daftar barang pada P.O. yang telah disetujui, maka barang² tersebut akan dianggap sebagai barang² yang diimpor dalam rangka Production Sharing sehingga tidak mendapat fasilitas² yang dimaksudkan untuk pemasukan barang² dalam rangka Production Sharing selanjutnja tidak dapat dibebankan atas jumlah kredit yang telah disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Survey Barang² Jang Diimpur Atas Beban Devisa Negara

INSTRUKSI

(PRESIDIUM KABINET DWIKORA REPUBLIK INDONESIA No. 63/D/Instr./1965.

PRESIDEN KABINET DWIKORA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa seringkali dialami, barang-barang jang diimpur/dilever oleh Importir-importir Indonesia, chususnja untuk pembelian jang dibebankan atas devisa Negara terdapat ketidak tjtjokan dengan ketentuan-ketentuan seperti jang tertjantum dalam kontraknja, antara lain : mengenai kwalita, kwantinta, pengepakan, pembungkusan dan sebagainya ; sehingga mengakibatkan kerugian jang tidak sedikit bagi Negara ;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, perlu dilakukan pengawasan dan penelitian sebaik-baiknya atas pembelian jang mempergunakan devisa Negara demi untuk mentjegah kemungkinan timbulnja kerugian bagi Negara jang disebabkan oleh karena tidak adanya pemeriksaan jang teliti mengenai kwalita, kwantinta, pengepakan dan sebagainya atas barang-barang jang diimpur ;
- c. bahwa adanya Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO) suatu badan surveyor jang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai suatu usaha tjampuran dengan General Superintendence Company Ltd. Geneva, jang memiliki kantor-kantor perwakilan hampir diseluruh negara dan telah mendapatkan kepertjajaan dikalangan Perdagangan Internasional sehingga djasa-djasa SUCOFINDO tersebut dapat dimanfaatkan ;
- d. bahwa perluasan kegiatan dari badan tersebut dalam bidang survey perlu mendapat fasilitas sebagaimana mestinja sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dibidang perekonomian ("Berdikari"), jaitu dalam memberikan djasa-djasa kepada pihak jang diwakilinja untuk melakukan pemeriksaan, pengudjian dan penilaian kwalita, kwantinta dan sebagainya atas barang-barang Pemerintah dalam rangka turut mengamankan projek-projek vital sehingga kemungkinan kerugian dapat dieliminir semimum mungkin ;

Mengingat :

1. Surat Keputusan Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri tanggal 20 Mei 1965 No. 051/5/MPLN/SK/65 ;

2. Surat J.M. Menteri Perdagangan tanggal Maret 1965 No. M. 0144/1965 ;
3. Amanat Berdikari P.J.M. Presiden Republik Indonesia Pemimpin Besar Revolusi dihadapan sidang M.P.R.S. tanggal 11 April 1965 di Djakarta ;
4. Penetapan Presiden No. 26 tahun 1965 ;

MENGINSTRUKSIKAN :

PERTAMA :

Barang-barang jang diimpur untuk keperluan dan atas nama Pemerintah jang dibebankan pada devisa Negara (seperti pembelian-pembelian dalam rangka R.I.B., kredit-kredit Pemerintah to G., production-sharing dan lain-lain sebagainya) harus disurvey (dilakukan pemeriksaan, pengudjian, penelitian dan penilaian) mengenai kwalita, kwantinta, packing, tjara-tjara pengangkutan dan pembongkarannya bila dianggap perlu dilihat dari segi kebutuhan tehnik dan komersial.

KEDUA :

Menundjuk dan memerintahkan kepada Superintending Company of Indonesia (SUCOFINDO) di Djakarta dan tjabang-tjabangnja, perwakilan perwakilan diluar negeri untuk memberikan djasa-djasa dalam melakukan survey tersebut dalam ajat "PERTAMA" ditempat pengangkutan dan/atau pelabuhan pembongkaran.

KETIGA :

Segala sesuatuja jang berkenaan dengan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas diatur lebih lanjut oleh Kuasa Menteri Perdagangan Luar Negeri dan/atau Menteri Urusan Bank Sentral.

Ditetapkan di : Djakarta

Pada tanggal : 23 Desember 1965.

A.n. PRESIDIUM KABINET DWIKORA
REPUBLIK INDONESIA
WAKIL PERDANA MENTERI III.

ttd.

(Dr. CHAIRUL SALEH)

PENTJEGAHAN DAN PEMBERANTASAN HAMA LASIODERMA

(Oleh : Lembaga Tembakau)

PENDAHULUAN.

Pentjegahan dan pemberantasan **Hama Lasioderma** bagi mereka yang berketjimpung di dalam pertembakauan ekspor untuk keperluan tjebu tidaklah merupakan hal yang baru. Tidaklah sedikit devisa yang hilang untuk ongkos pengangkutan kembali di Bremen dan turunnja harga disebabkan oleh serangan hama Lasioderma. Semua usaha ditempuh mulai dari masanja tembakau didalam gudang apak sampai di veem dan kapal, demi selamatnja party² tembakau yang maka kirim.

Didalam pentjegahan dan pemberantasan hama Lasioderma ini, **LEMBAGA TEMBAKAU** ikut mengawasi dan membimbing dengan djalan antara lain memeriksa bal-bal tembakau yang dikirim di pelabuhan, memberi penjuluhan di gudang² dan pada pertengahan tahun 1965 mulai mengerjakan "CERTIFICATE OF FUMIGATION" yang berarti bahwa tembakau yang dikirim sudah "ontsmet":

dengan mempergunakan dosis insektisida tjukup,

tjara menjusun bal tepat, kamar ontsmet tidak botjor, semuanya d'awasi oleh Lembaga Tembakau.

Dengan tindakan ini diharapkan setiap party tembakau yang keluar dari pelabuhan Indonesia bebas dari Lasioderma yang diuga berarti menjamatkan devisa yang sangat diperlukan oleh Pemerintah.

PENTJEGAHAN DAN PEMBERANTASAN.

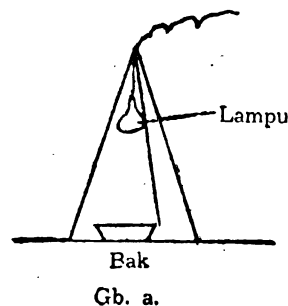
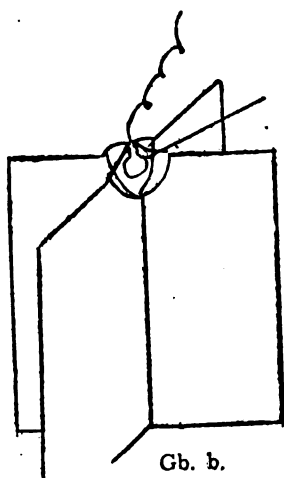
Sebagai pedoman pentjegahan dan pemberantasan Hama Lasioderma dapat dikemukakan sebagai berikut :

Kebersihan gudang apak dan veem.

- Sebelum dipergunakan dinding gudang dikapur dengan tjampuran 25 gram insektisida (dieldrin/DDT dll.) dan 1 kg kapur. Tjampuran ini mempunyai dajatahan sampai enam bulan.
- Gudang dan alat² yang akan dipergunakan mengolah tembakau disemprot dengan insektisida (dieldrin) 50% WP*), konsentras: 5 — 10%.
- Penjemprotan periodik 2 — 3 kali tiap satu minggu bila tembakau sudah berada di dalam gudang dengan dieldrin tjairan 5 — 10 cc/L air atau dieldrin 50% WP. 1½ — 2 gr/L air.

Disamping itu lantai² harus selalu bersih dari debu, daun² tembakau, tali² agel dan kotoran² lainnja. Disediakan kerandang² tempat sampah, yang selandjutnja sampah tersebut dibakar.

- Setelah tembakau yang ada didalam gudang habis, sisa tembakau yang tidak dapat digunakan dibakar dan gudang² serta alat²nja yang dipergunakan disemprot lagi seperti pada (b) diatas.
- Gudang tempat menjimpan bal² tembakau yang tidak boleh terlalu kering/lembab dan kebersihannja selalu didjaga. Bal² ditumpuk diatas papan yang diatasnja diberi tikar.
- Gudang veem, sesek², lan'ai tikar sebelum dipakai supaya disemprot dengan dieldrin 20% EC**) dengan tjampuran 70 cc/liter air.
- Pada tiap² gudang yang dipergunakan untuk mengolah atau menjimpan tembakau dipasang lampu penangkap Lasioderma.



Keterangan gambar :

- lampu diberi tiang setinggi $\pm 0,5$ m dibawahnja diberi bak yang berisi air gula sebagai penangkap kumbang Lasioderma.
 - lampu digantungkan diatas dengan diberi 2 plat segiempat yang dipasang saling tegak lurus dan diberi zat perekat misalnja : vaselin. Lampu tersebut dipasang pada malamhari antara djam enam sore sampai djam enam pagi. Bila ada kumbang akan menempel pada perekat atau masuk kedalam air.
2. Tjara pengegasan (ontsmet).

- a. Setiap akan mulai ontsmet, beberapa bal tembakau diperiksa untuk mengetahui ada/tidaknja hama Lasioderma, agar dapat ditentukan tindakan apa jang harus dilaksanakan.
- b. Penumpukan bal² disusun sedemikian sehingga insektisida dapat merata (lihat gambar).

- (1) Bagian dasar diberi papan jang ditutup dengan tikar glangsi. Bagian tepi diberi bambu berdiri ± 10 cm, agar bal² tidak menempel pada dinding.
- (2) Jarak antara deretan tumpukan bal jang satu dengan lainnja lebih kurang 10 cm, kalau perlu diberi bambu agar tidak merapat lagi.
- (3) Antara lapisan² bal dengan lainnja diberi antara "bantalan", terdiri dari bahan lunak misalnja gulungan agel, djerami dan lain² sebagainya.
- (4) Tinggi tumpukan maksimum 7 bal dengan pengertian hanja boleh menggunakan 2/3 tinggi kamar ontsmet.

c. Setelah selesai menumpuk bal, kamar ontsmet ditutup serapat mungkin agar tidak terjadi kebotoran. Hal ini dapat diawasi dengan memeriksa sekeliling gudang satu hari sesudah insektisida dituangkan.

d. Setelah keluar dari kamar ontsmet, terutama bal² tembakau jang terserang Lasioderma diperiksa untuk kepastian bahwa kumbang, larva dan telur sudah mati.

e. Insektisida jang sampai sekarang dipergunakan terdiri dari:
 carbon disulfida (CS₂)
 Allylchlorida
 Mathalyl clorida dll.
 dengan dosis untuk:

- (1) pentjegahan atau preventive 150 cc/M³ selama 5 x 24 djam lebih lama (125 cc/M³ selama 5 x 24 djam).
- (2) pemberantasan atau curatif, 150 cc/M³ selama 5 x 24 djam atau lebih lama.

3. Gudang pengegasan (kamar ontsmet).

- a. Umumnja kamar ontsmet dibuat dengan kapasitas sebanjak 250 — 300 bal, tinggi 3½ — 4 m, dibuat sedapat mungkin dengan atap; jang paling baik dari beton.
- b. Pintu bagian tepi sebelah dalam, pigura pintu dilapisi karet atau ditutupi dengan kertas sehingga dapat tertutup dengan rapat sekali.
- c. Tempat insektisida dipasang $\pm 0,5$ m dari atap dan jarak tumpukan bal jang paling atas minimum $\pm 0,5$ m.
- d. Untuk dapat menuang insektisida dari luar, maka diberi saluran dari pipa jang menembus dinding keluar. Setelah selesai mengisi saluran ini supaja ditutup rapat.

4. Lain-lain.

- a. Kendaraan pengangkut jang akan dipergunakan disemprot dengan DDT dieldrin 50 WP *) dengan konsentrasi 0,1%. ***).
- b. Sebelum melakukan ontsmet, para pemilik gudang/pemilik tembakau menghubungi petugas Lembaga Tembakau setempat. Dan bila saatnja ontsmet tiba, salah seorang petugas akan menjaksikan dan mengawasi apakah sjarat² seperti pada 2b tersebut atas telah dipenuhi.
- c. "Certificate of fumigation" dibuat rangkap (empat) dengan perintjian sebagai beriku
 (1) 2 (dua) lembar untuk Lembaga Tembakau (dengan tjatatan 1 lembar untuk Panitia Ad Hoc di Bremen),
 (2) 1 (satu) lembar untuk veem,
 (3) 1 lembar untuk arsip eksportir.

C. KERUGIAN AKIBAT HAMA LASIODERMA

Menurut laporan Panitia Ad Hoc Pengawasan Pelaksanaan Pendjualan Tembakau di Bremen tertanggal 22 Desember 1965, masih terdapat kerusakan² dalam djumlah besar jang dialami oleh tembakau² krosok Indonesia, disebabkan oleh hama Lasioderma. Menurut laporan tersebut, dalam tahun 1965 terpaksa harus diadakan pengegasan kembali terhadap 32.954 bal tembakau jang terkena hama Lasioderma tersebut hingga perlu dikeluarkan biaja sebesar DM. 2.201, suatu biaja diluar negeri jang tak dapat kita abaikan ditinjau dari persediaan devisen.

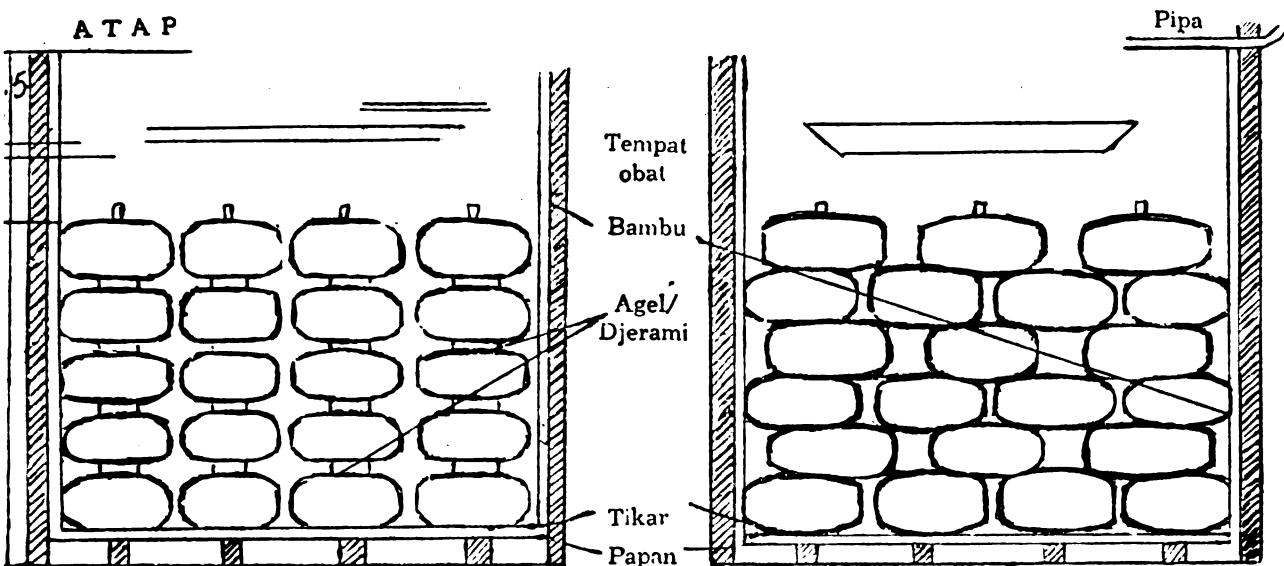
Bila dibandingkan dengan tahun 1964, djumlah tembakau Indonesia jang terpaksa digas kembali dalam tahun 1965 menunjukkan suatu penurunan, tetapi bila dibandingkan dengan tahun 1963 ternjata masih tjukup minta perhatian. Hal ini dapat terlihat dari angka² seperti di bawah ini, jang kami kutip dari laporan Panitia Ad Hoc Pengawasan Pelaksanaan Pendjualan Tembakau di Bremen tersebut diatas :

T a h u n : Djumlah baal tembakau Indonesia jang terpaksa digas kembali di luar Negeri.

1963	24.859 bal.
1964	55.484 bal.
1965	32.954 bal.

Perlu diketahui, bahwa tembakau krosok Indonesia diluar negeri dibutuhkan terutama untuk deckblatt dan omblatt, sedang bagi kebutuhan fillers, tembakau Indonesia kurang begitu penting. Maka dengan adanya pengrusakan² oleh hama Lasioderma, hal ini akan berarti mengurangkan nilai tembakau Indonesia sebagai deckblatt maupun omblatt, jang setjara tidak langsung akan mengurangi devisen jang seharusnya diperoleh negara kita dari pendjualan tembakau kita di luar negeri tersebut.

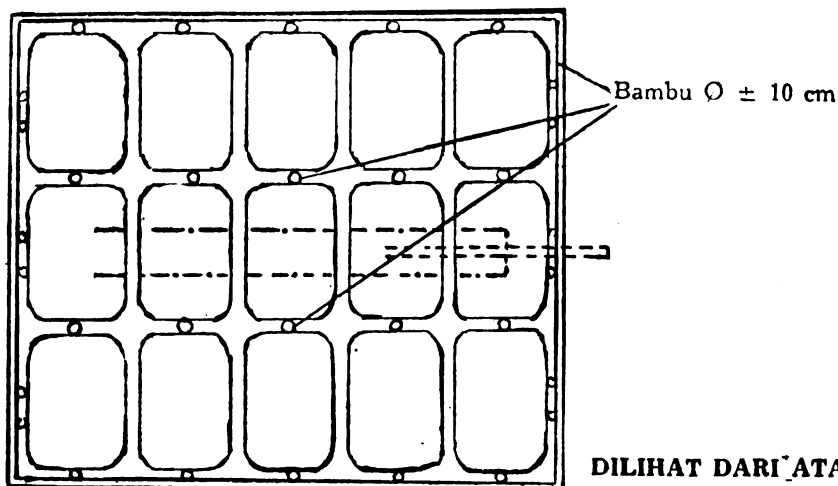
TJARA MENUMPUK BAL DIKAMAR ONTSMET



DILIHAT DARI SAMPING MEMENDEK

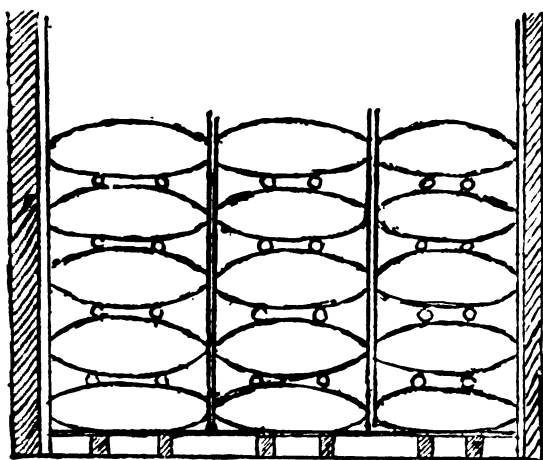
TJARA MENJUSUN I

TJARA MENJUSUN II

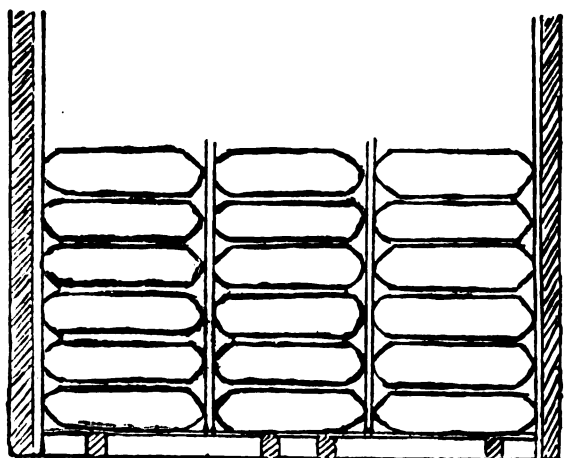


DILIHAT DARI ATAS

TJARA MENJUSUN I & II



TJARA MENJUSUN I



TJARA MENJUSUN D

DILIHAT DARI SAMPING MEMANDJANG

P. T. NILAKANDI

IMPORT - EXPORT & INDUSTRY

HEAD — OFFICE : DJAKARTA
ADDRESS : 85 FE PEDJAGALAN
PHONE : 21168 — 21714
Cable : NILA DJAKARTA

BRANCHES :

- 1. Djalan Karet 20, Palembang**
- 2. Djalan Sarenarwa 409, Telukbetung**
- 3. Djalan Raya Sapat, Indragiri**
- 4. Djalan Tengah, Rengat**
- 5. Djalan Imam Bondjol 163, Padang**
- 6. Djalan Kali Baru Barat 9, Semarang**

EXPORT :

RUBBER
COPRA
COFFEE
PEPPER
CASSIA VERA

IMPORT :

All kinds of Commodities

Varia berita singkat:

Ekonomi/Perdagangan Dalam Negeri

1. BIRO PUSAT STATISTIK KEMBALI PADA PRESIDUM KABINET DWIKORA.

Kedudukan Biro Pusat Statistik berdasarkan Undang-Undanan No. 7 Tahun 1960, dalam rangka susunan Kabinet Dwikora, berarti dibawah pimpinan Presidium.

Dengan pertimbangan tersebut, maka dengan **Keputusan Presiden R.I. No. 340 Tahun 1965** tertanggal dan berlaku mulai 10 Nopember 1965 telah ditjabut Keputusan Presiden R.I. No. 92 Tahun 1965 tentang penyerahan Biro Pusat Statistik kepada Menteri Urusan Research Nasional.

Djuga telah ditetapkan dengan **Keputusan Presiden R.I. No. 341 tahun 1965**, bahwa kepada Menteri Research Nasional diberi kuasa (didelegasikan) untuk atas nama Presidium Kabinet Dwikora memimpin dan membina Biro Pusat Statistik, dan bertanggung djawabkan segala pelaksanaan aktivitasnya kepada Presidium Kabinet.

2. PEMBANTU MENTERI PERIKANAN DAN PENGOLAHAN LAUT.

Demi kelantjaran tugas² dalam bidang perusahaan pada Departemen Perikanan dan Pengolahan Laut, maka dengan **Keputusan Presiden No. 313 Tahun 1965** tertanggal dan mulai berlaku 21 Oktober 1965, **Majlor Laut Abdul Madjid** telah diangkat sebagai pembantu Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut Urusan Perusahaan.

3. PENGUSAHAAN PRODUKSI PERTAMANGAN LOGAM EMAS DAN PERAK OLEH PEMERINTAH.

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan Komando DWIKORA dibidang ketahanan revolusi maka diundang perlu menertibkan semua produksi emas dan perak, baik yang dihasilkan oleh Pertambangan² Negara maupun oleh pertambangan² swasta/rakjat sehingga penghasilan daripada produksi logam² tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat Tjadangan Negara/Dana Revolusi.

Untuk mentjapai tudjuan tersebut maka dengan **Keputusan Presiden R.I. No. 311 Tahun 1965 tgl. 10 Oktober 1965** telah ditetapkan tentang penguasaan semua produksi pertambangan² Negara dan pertambangan-pertambangan Swasta/Rakjat berupa logam emas dan perak oleh Pemerintah.

Menteri Pertambangan dan Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta dengan bimbingan dan pengawasan Menko Pembangunan bertindak atasnama Pemerintah selaku Badan Penguasa Produksi Pertambangan Emas dan Perak.

Kepada Badan Penguasa Produksi Pertambangan Emas dan Perak diberi wewenang penuh untuk mengatur dan menetapkan harga penyerahan produksi emas dan perak termaksud diatas dan memperhatikan harga dasar pokok.

Badan Penguasa Produksi Logam emas dan perak diwadajibkan menjetorkan seluruh hasil daripada logam emas dan perak kedalam rekening „Tjadangan Negara/Dana Revolusi“.

Administrasi dan pengamanan produksi logam emas dan perak termaksud diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan oleh Menteri Urusan Bank dan Modal Swasta.

Pelepasan² daripada „Tjadangan Negara/Dana Revolusi“ hanya dapat dilakukan atas isin c.q. Keputusan Presiden/Pemimpin Besar Revolusi.

Peraturan² dan ketentuan² pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Badan Penguasa Produksi logam emas dan perak, dengan persetujuan Menko Pembangunan.

Demikianlah Keputusan tersebut jang mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 1965.

4. PEMBANTU UTAMA MENTERI PENERBITAN BANK DAN MODAL SWASTA.

Dengan **Keputusan Presiden R.I. No. 339 Tahun 1965** tertanggal 10 Nopember 1965 telah mengesahkan Surat Keputusan Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta No. 30/64/MUPBMS/tgl. 24 Nopember 1964 tentang penundjukan **Drs Baro Ismaoen** sebagai Pembantu Utama Menteri Penertiban Bank dan Modal Swasta untuk Urusan Koordinasi. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal d'tetapkannja dan mempunjai dajasurut sampai tgl. 24 Nopember 1964.

5. KAPAL² KOPRA DIHARUSKAN ANGKUT BARANG² PEMERINTAH DATI I SULTENG.

Berhubung dengan kenyataan, bahwa barang² jang harus diangkut dari Djawa ke daerah Sulawesi Tengah senantiasa mengalami kesulitan² pengangkutan, oleh Gubernur KDH Daerah Tingkat I Sula-

wesi Tengah — Anwar Gelar Datuk Madjo Basa Nan Kuning — telah menginstruksikan para pengusaha di Daerah Sulawesi Tengah, yang akan mengangkut kopra dari Sulawesi Tengah baik dengan kapal charter maupun kapal lainnja dan yang telah memiliki surat² lengkap, untuk mengangkut barang² milik Pemerintah Daerah dan djawatan²/instansi² lainnja ke pelabuhan Sulawesi Tengah.

Untuk pelaksanaan maksud ini, para pengusaha diwadjabkan melaporkan keberangkatan kapal²nja. (ANTARA).

6. DELAPAN BUAH KAPAL MOTOR PENANGKAP IKAN UNTUK AERTEMBAGA.

Tujuh buah kapal motor penangkap ikan model „Tjakalang” dari pelbagai matjam ukuran dan „serbaguna”, serta sebuah lagi yang disebut „Kelasworo” berukuran 70 ton telah diberangkatkan dari pelabuhan Djuana menudju pelabuhan Aertembaga (Sultara). Kapal² tersebut adalah hasil produksi P.N. Perkapalan BADJA Djuana atas pesanan P.N. Perikani Aertembaga/Manado.

7. POTENSI BAHARI SANGAT MENENTUKAN DALAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA.

Potensi bahari telah memberikan dharmabaktinja yang sangat menentukan dalam pembinaan kesatuan bangsa. Negara kita yang terdiri dari beribu² pulau, tidak dapat disangkal lagi bahwa angkutan laut adalah satu²nja alat yang paling murah dan efisien dalam memperlantjar hubungan antarpulau dan daerah. Demikian a.l. Menko Maritim/Menteri Perhubungan Laut dalam amanatnja pada upatjara peringatan Hari Bahari di Pekanbaru.

8. INSTRUKSI UNTUK MENG-UPGRADE KARET RAKJAT.

Sesuai dengan instruksi Menteri Perkebunan Drs Frans Seda tanggal 14 Nopember 1964 No. 45/M/P.M./T.P./64, maka pada tanggal 10 Nopember 1965 telah diperintahkan kepada B.P.U.-P.P. Dwikora dan PP Ampera I dan II agar: Menginstruksikan kepada semua perkebunan/pabrik² karet dalam lingkungannja untuk segera mungkin ikut serta dalam pelaksanaan upgrading/integrasi karet rakjat menurut adanja over/idle capacity dan kemampuan masing² pabrik, satu dan lain hal sesuai dengan instruksi tersebut.

Kepada semua instansi yang bersangkutan diharapkan bantuan seperlunja atas kelantjaraan pelaksanaan instruksi ini.

9. RENTJANA PENANAMAN KAPAS UNTUK 1966-1968.

Dalam rangka melaksanakan prinsip BERDIKARI dibidang sandang, maka Departemen Perkebunan cq. P.P.N. Serat telah mengadakan rentjana tiga tahun penanaman kapas di daerah² cottonbelt Lombok, Sumbawa, Flores, Timor dan Sumba; djuga didaerah²

Djawa Timur seperti Asembagus dan Kediri dan Djawa Tengah seperti Pati dan Demak.

Djumlah produksi di daerah cottonbelt diperkirakan akan mentjapai 3 ton ditahun 1965, 35 ton tahun 1966, 80 ton ditahun 1967 dan 100 ton tahun 1968. Sedang didaerah Djawa Timur jang pada tahun 1965 djumlah produksinja berkisar pa 139 ton, pada tahun 1968 dihaarapkan mentjapai djumlah 700 ton (tudjuratus ton), sementara daerah Djawa Tengah yang menghasilkan 3 ton ditahun 1965 ini, pada tahun 1968 diharap mentjapai produksi 100 ton.

Pembelian kapas rakjat di Nusatenggara oleh Pemerintah ditahun 1965 ini diperkirakan meliputi djumlah 30 ton dan ditahun 1968 diharapkan mentjapai djumlah 600 ton, sedang di Djatim dan Djateng yang tadinja meliputi djumlah 10 ton diharapkan pada tahun 1968 berdjumlah 500 ton.

Mengenai hasil² projek pemintalan dan pertembunan didaerah Asembagus dikabarkan bahwa selanjutnya ditahun 1965-1966 tidak dihasilkan apa², pada tahun 1968 diharap bisa menghasilkan 12 djuta ya benang.

Persediaan bibit tahun 1965 menurut perhitungan Departemen Perkebunan, berdjumlah 220 ton. 1 ton dipergunakan oleh PPN Serat dalam rangka integrasi dengan rakjat di daerah cottonbelt, sedasisaanja untuk daerah² lainnja seperti untuk Sumatra Utara dan Sulawesi masing² 10 ton bibit kapas. Disini dianut prinsip supaja bibit yang disebarkan djangan didjadikan bahan spekulasi, melainkan di PPN Serat langsung diserahkan kepada produsen penanam kapas disamping mutunja didjamin pula.

Usaha integrasi ini diselenggarakan dalam rangka pengintegrasian pemikiran dan pelaksanaan has Mubesan yang baru sadja berachir baru² ini, ser untuk membangkitkan usaha swasembada rakjat untuk berdikari dibidang sandang. Demikian Hum Dep. Perkebunan.

10. "OLIGARCHISCHE CLAUSULE DILAKUKAN DALAM ANGGARAN DASAR BANK SWASTA.

Kebiasaan untuk mempergunakan "oligarchische clausule" dalam Anggaran Dasar perbankan swasta sudah tidak seirama dan tidak sesuai lagi bahkan bertentangan dengan dasar tudjuan Revolusi Indonesia menudju kepada Masyarakat Sosialis Indonesia.

Struktur administrasi perbankan swasta dalam menudju terwujudnja masyarakat Sosialis Indonesia harus didjwai keadilan yang sehat dan merata.

Dalam rangka penjesuaian kepada P.P. No. 1 Tahun 1964 perlu persjaratan² yang mentjegah adanya dominasi perseorangan atau sekelompok orang yang dapat merugikan kepentingan perbankan swasta dalam usaha membantu pembangunan pada umumnya dan meninggalkan produksi pada khususnya.

Dengan pertimbangan² tersebut diatas, oleh Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta d

Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan Bersama No. 28/KEP/MUPBMS/65 tertanggal dan mulai J.A. 5/119/15

tanggal 23 Oktober 1965 telah ditetapkan tambahan ketentuan² bagi perusahaan perbankan Swasta sebagai berikut :

Semua Bank² Swasta baik yang sudah ada maupun yang akan didirikan tidak diperkenankan memuat ketentuan² dalam Anggaran Dasarnya yang pada hakekatnya dapat menimbulkan dominasi perseorangan atau sekelompok orang² atas bank, yang lazimnya berupa „oligarchische clause”.

Perubahan Anggaran Dasar daripada bank yang telah ada guna melaksanakan ketentuan tsb. diatas sudah harus selesai dalam djangkawaktu 6 (enam) bulan setelah berlakunya Keputusan Bersama ini.

Ketentuan² „oligarchis” dalam Anggaran Dasar Bank sebagaimana dimaksudkan tsb. diatas ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta.

Oleh Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta dalam Surat keputusannya No. 31/KEP/UPBMS/65 tgl. 11 Nopember 1965 telah ditetapkan ketentuan² pelaksanaan untuk menghilangkan sur² „oligarchis” dalam Bank Swasta, sbb. :

Bank² Umum/Tabungan Swasta serta semua mam bank Swasta lainnya baik yang sudah ada maupun yang akan didirikan, diwadajibkan memenuhi ketentuan² sebagai berikut :

Saham :

1. Bank hanya diperkenankan mempunyai dua matjam saham jaitu : **saham sendiri** dan **saham biasa**.
2. Seluruh pemegang saham, jaitu pemegang saham pendiri dan pemegang saham biasa berdjumlah sedikit²nja 50 (limapuluh) orang.
3. Setiap pemegang saham, baik pemegang saham pendiri maupun pemegang saham biasa tidak boleh memiliki saham melebihi 2% (dua prosen) dari djumlah modal statuter.
4. Diantara Pengurus Bank (anggota² Dewan Komisaris serta Direksi) tidak diperkenankan adanja hubungan keluarga suami-isteri, orang-tua-anak, adik-kakak.

Hak suara :

Ketjuali dalam pembagian keuntungan, setiap saham tanpa memperhatikan besar ketjilnja nilai nominalnja, mempunyai hak suara yang sama dalam hal apapun yang bersangkutan dengan Bank.

Pemindahtanganan saham dan kehilangan hak suara :

Setiap pemindahtanganan saham harus dilakukan dengan izin Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta melalui prosedur yang berlaku;

pemindahtanganan saham yang dilakukan tidak menurut ketentuan diatas dengan sendirinja tidak sah dan saham (saham²) tersebut tidak mempunyai hak suara.

d. Rapat Umum pemegang saham :

1. Kekuasaan tertinggi dalam Bank adalah rapat umum pemegang saham.
2. Pada dasarnya para pemegang saham diwadajibkan menghadiri sendiri rapat² pemegang saham.
Apabila terpaksa diperlukan adanja pemberian kuasa kepada orang lain untuk keperluan tersebut diatas, maka orang yang diberi kuasa tersebut harus warganegara Indonesia dan mewakili sebanjak²nja 4 (empat) orang pemegang saham, termasuk dirinja sendiri bilamana dia seorang pemegang saham.
3. Keputusan dalam rapat umum pemegang saham harus diambil dengan tjara musjawarah untuk mufakat. Untuk mendjamin terpenuhinja hal ini, maka semua Keputusan dalam rapat umum pemegang saham harus mendapat persetujuan dari Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta.

e. Pemberian kuasa oleh Direksi :

Dalam melakukan fungsinja yang timbul dari Anggaran Dasar Bank, Direksi/anggota Direksi tidak diperkenankan memberi kuasa yang bersifat umum/tidak terbatas kepada orang lain, ketjuali setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta.

Semua Bank² Swasta yang telah ada diwadajibkan mengadakan penjesuaian Anggaran Dasarnya dengan ketentuan² diatas dalam djangkawaktu selambat²nja 6 (enam) bulan setelah berlakunya Keputusan Bersama Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta dan Menteri Kehakiman No. 28/Kep/MUPBMS/1965 — No. J.A. 5/119/15.

Hal² yang belum diatur dalam Keputusan Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta, diatur lebih lanjut oleh Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta.

Ketentuan² yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak diatur lain menurut Surat Keputusan ini.

11. PELAKSANAAN PROJEK² PERTAM-BANGAN.

Pelaksanaan projek² pertambangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdjalan seperti biasa tidak mengalami kematjetan. Projek **Tambang Emas Logam di Riau Daratan** diharapkan sudah akan selesai dalam waktu yang dekat ini. Disamping itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah, dimana logam² emas dan perak dimasukkan dalam rangka memperkuat Tjadangan Negara/Dana Revolusi, maka dropping Anggaran Pembiajaan untuk pembukaan **Tambang Emas Meulaboh (Atjeh)** diharapkan realisasinja dalam waktu yang dekat pula.

Projek **Tambang Intan di Kalimantan Selatan**, **Projek Pasir Besi Tjilatjap** dan **Projek Nikel di Sulawesi** telah mendapat perhatian besar dari PJM Presiden dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 017/Instr/65 tanggal 19 Oktober 1965.

Untuk memperhebat pelaksanaan pembangunan Projek Nikel di Sulawesi, pada tanggal 3 Nop. j.l. telah diberangkatkan suatu team persiapan pengolahan nikel di **Malili**, Sulawesi, yang terdiri dari ahli² pertambangan metalurgi, geologi, seorang dokter dan tenaga² bantuan lainnya.

Pada saat ini Projek Pasir Besi Tjilatjap sedang mempersiapkan dan melaksanakan industrial — test dengan electrical furnace untuk menghasilkan pig iron dan sekarang telah memproduksi 10 ton pig iron. (ANTARA)

12. PEMBANTU² MENTERI P.D.P.T.P.

Para Pembantu Menteri P.D.P.T.P. (yang telah dilantik pada tgl. 17-10-1965) :

- a. **Brigdjen Utojo Utomo** sebagai Pembantu Utama Menteri,
- b. **Ir Abu Prajitno** sebagai Pembantu Menteri Urusan Umum
- c. **Hartono Wir'odinoto** sebagai Pembantu Menteri Urusan Perkereta-Apian.
- d. **S.H. Simatupang** sebagai Pembantu Menteri Urusan Pos Giro dan Telekomunikasi.
- e. **Letkol (I) Djali Aznam** sebagai Pembantu Menteri Urusan Kepariwisataaan.
- f. **Drs Sukcno Sumobaskoro** sebagai Pembantu Menteri Urusan L.L. & A.D.R.

13. R.P.A. INGIN MEMBELI KARET DAN TIMAH DARI INDONESIA.

R.P.A. telah menyatakan keinginannya untuk membeli karet dan timah dari Indonesia, sebaliknya R.P.A. bersedia mengeksport tekstil dan gypsum ke Indonesia. Demikianlah a.l. keinginan yang dikemukakan oleh Pemerintah R.P.A. kepada delegasi Dagang Indonesia yang mengundjungi Kairo baru² ini dibawah pimpinan Brigdjen Achmad Sukendro, Menteri/Kepala Staf KOTOE.

Selanjutnya oleh R.P.A. menyatakan pula keinginannya kepada misi pengusaha industri Indonesia untuk membeli hasil² industri Indonesia, khususnya barang² karet dan makanan dalam kaleng. Djuga untuk phosphor dan margarin dari Indonesia, tapi kedua matjam barang ini masih diminta spesifikasi-nya baik mengenai kwalita maupun mengenai harga-nya. (ANTARA)

14. PROJEK PABRIK MINJAK KELAPA DAN MINJAK ATSIRI DI PALEMBANG DAN ATJEH.

Wakil PM I/Menlu Dr Subandrio selaku Ketua Panitia Menteri Urusan Kredit Luar Negeri atas Dasar Production Sharing telah memberikan persetujuan atas kontrak² production sharing untuk :

- a. Projek Fabrik Minjak Kelapa di Palembang — antara P.T. Sribunian dengan Technoexport Sofia (Bulgaria)
- b. Projek Pabrik Minjak Atsiri di Blanggrak (Atjeh) — antara P.T. Pita Keumala dengan Technoexport Sofia (Bulgaria).

15. PENJERAHAN PENGUSAHAAN PERUSAHAAN² ASING KEPADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN RINGAN DAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN TEKSTIL.

Berhubung dengan ditingkatkannya Departemen Perindustrian Rakjat menjadi Kompartimen Perindustrian Rakjat dan terbentuknya Departemen baru dalam lingkungan Kompartimen Perindustrian Rakjat, dianggap perlu menjerahkan wewenang, hak dan kewajiban atas penguasaan terhadap perusahaan² asing yang termasuk bidang Perindustrian Rakjat kepada Departemen yang bersangkutan sesuai dengan bidangnya masing².

Dengan pertimbangan tsb. diatas maka dengan Keputusan Menko Kompartimen Perindustrian Rakjat tgl. 17 Nop. 1965 No. 131/SK/MKO/XI telah diserahkan segala wewenang, hak dan kewajiban atas Badan Penguasa Perusahaan² Asing yang termasuk bidang Perindustrian Rakjat — BAPPAR — kepada Departemen Perindustrian Ringan dan Departemen Perindustrian Tekstil.

Menteri Perindustrian Tekstil dapat meminta kepada Menteri Perindustrian Ringan agar supaya pegawai² atau peralatan tertentu daripada BAPPAR diserahkan kepada Dep. Perindustrian Tekstil.

Perusahaan yang diserahkan kepada Departemen Perindustrian Tekstil adalah **Perusahaan Tekstil „NEBRITEX“**.

Kepada Departemen Perindustrian Ringan diserahkan Perusahaan Rokok dan Tembakau „BAT“, Perusahaan Rokok dan Tembakau „FAROKA“, Perusahaan Bir „HEINEKENS“, Perusahaan Limu „FRASER & NEAVE“, Perusahaan Minjak, Sabun dan Mentega „UNILEVER“, Perusahaan Mentega „FILMA“, Perusahaan Tapalgi dsb. „PRODUCTION“, Perusahaan Battery „EVEREADY“ dan Perusahaan Sepatu „BATA“ dsb.

16. PENJERAHAN BPU-PNPR DAN PNPB KEPADA DEPARTEMEN² DALAM LINGKUNGAN AN KOMPERINDRA.

Dengan Keputusan Menko KOMPERINDRA tgl. 17 Nopember 1965 No. 132/SK/MKO/XI telah ditetapkan pula penjerahan BPU-PNPR dan PNPB kepada Departemen Perindustrian Ringan, Dep. Perindustrian Keradjinan dan Dep. Perindustrian Tekstil.

- a. Perusahaan Negara Industri Urusan Penelitian, Pembinaan dan Pendidikan (PNPR „NUPIKS YASA“) kepada Departemen Perindustrian Ringan; ketjujali Balai Penelitian Tekstil di Bandung, Pilot Projek Pemintalan Kapas di Bandung

dan Akademi Tekstil di Bandung kepada Departemen Perindustrian Tekstil; dan Balai Penelitian Keramik di Bandung dan Balai Penelitian Batik di Jogjakarta kepada Departemen Perindustrian Keradjinan.

Perusahaan Negara Industri Urusan Mekanisasi (PNPR „DAYA YASA”) kepada Departemen Perindustrian Keradjinan.

Perusahaan Negara Pembangunan Industri Rakjat (PNPR „KARYA YASA”) kepada Departemen Perindustrian Tekstil; ketjuali projek² :

1. Penggadjian kaju di Dumai,
2. Baterij di Tjiawi, Bogor
3. Batagenteng di Tjilegon, Serang
4. Redrying tembakau di Tandjung Tirto, Jogjakarta.
5. Citronella di Tawangmangu, Sala
6. Redrying Tembakau di Bodjonegoro.
7. Marmer di Tulungagung,
8. Kajudjati di Walikukun, Madiun,
9. Galangan Kapal Kaju Banjuwangi,
10. Tannine di Singosari, Malang,
11. Plywood di Kotabaru, Pulau Laut, Kalimantan Selatan,
12. Bata-genteng di Kema, Sulawesi Utara, diserahkan kepada Departemen Perindustrian Ringan; dan projek² 1. Bambu di Jogjakarta, 2. Gamelan di Sala, 3. Bambu di Magetan dan Batik di Sala kepada Departemen Perindustrian Keradjinan.

17. EKSPOR INDONESIA KE DJERMAN BARAT.

Ekspor Indonesia ke Djerman Barat dalam tahun 1964 berharga 168,7 mark. Ini berarti bahwa Djerman Barat menduduki tempat kelima diantara negara² jang paling banjak mengimpor hasil² Indonesia. Sebaliknya ekspor Djerman Barat ke Indonesia menduduki tempat ketiga sesudah Amerika Serikat dan Djepang.

Hasil bumi Indonesia jang terbanjak diekspor ke Djerman Barat a.l. tembakau, karet, timah, teh dan jaju² tropis. Djuga hasil keradjinan tangan Indonesia banjak digemari di Djerman Barat, tapi sebegitu jauh supplynja masih djauh djumlahnja dari permintaan. (ANTARA — 27-XI-65).

18. PENETAPAN MONSTER KAPOK.

Dengan disaksikan Gubernur/KDH Djawa Tengah brigdjen KKO Mochtar, pendjabat² resmi jang berangkat serta para eksportir kapok dan undangan bertempat di gudang P.T. KAPOK INDONESIA, Jl. Asahan, Pelabuhan Semarang pada tanggal 23 Nopember 1965 telah dilangsungkan penetapan monster kapok untuk tahun 1965/1966, jang diadakan oleh P.T. Kapok Indonesia.

10 djenis kapok telah diambil standard monster-ja jaitu : Prima Estate, Estate, Prima Japara, C.A., U., C.E., C. Min., C. Off, SP I dan SP II jang

dilakukan oleh para ahli, selain terdiri dari para ahli kapok dari instansi resmi maupun swasta. (ANTARA, 25-XI-65).

19. ANGGAUTA² DEWAN SANDANG NASIONAL (DESANAS).

Dengan Keputusan Presiden R.I. No. 336 Tahun 1965 tanggal 22 Nopember 1965 telah ditetapkan susunan dan anggauta² Dewan Sandang Nasional (DESANAS) jang terdiri dari :

- a. Wakil Perdana Menteri III sebagai Ketua merangkap anggauta,
- b. Menko Kompartimen Perindustrian Rakjat sebagai Wakil Ketua I merangkap anggauta,
- c. Menteri Kepala Staf KOTARI sebagai Wakil Ketua II merangkap anggauta,
- d. Menteri Perindustrian Tekstil sebagai Wakil Ketua III merangkap sebagai Ketua Eksekutif dan djuga sebagai anggauta.

Selain itu susunan keanggotaan DESANAS ini dilengkapi pula dengan tigabelas orang jang terdiri dari Menko² dan Menteri².

Djuga ditetapkan bahwa semua wewenang dan kegiatan² jang diberikan kepada KOTOE mengenai penertiban dan kebidjaksanaan dalam bidang sandang dihentikan; dan semua peraturan² jang bertentangan dengan surat keputusan ini dianggap tidak berlaku lagi.

20. DINAS PENERBANGAN ELEKTRA DJAKARTA-MANADO DIRESMIKAN.

Hubungan udara Djakarta-Manado jang sedjak tahun 1961 mempergunakan pesawat Convair, pada tanggal 24 Nopember 1965 telah ditingkatkan dengan pesawat Electra. Peresmian hubungan Electra Djakarta-Manado ini telah dilakukan oleh Pembantu Menteri Perhubungan Udara Urusan Operasi Komodor Udara Sugoro dalam upatjara di lapangan terbang MAPANGET — Manado dan dihadiri pula oleh Direktur Utama PN Garuda Capt. Soedarmo serta Pantja Tunggal dan keluarga perwakilan Garuda Manado.

Hubungan udara Electra Djakarta-Manado itu untuk taraf pertama hanya dilakukan satu kali dalam seminggu, dengan demikian hubungan udara Djakarta Manado dilakukan 4 kali seminggu dengan pesawat Convair dan sekali dengan Electra. (Djakarta-Manado hari Rabu, Manado-Djkt : Kamis).

Djarak antara Makasar-Manado ditempuh dengan pesawat Electra dalam waktu 1.45 menit. (ANTARA, 26-XI-65).

21. PEDAGANG TENGKAWANG SEBAGAI PIUTANG PADJAK PENJUJALAN.

Buah tengkawang merupakan buah hutan jang terdapat dihutan² Kalimantan Barat dan hanya sebagian ketjil sadja merupakan hasil perkebunan (± 25%). Masa panen (berbuah) dari tengkawang tidak tetap, kadang² tiga tahun, kadang² lima tahun

sekali. Hasil akhir (eindproduct) dari buah tengkawang yang sudah melalui proses² pengolahan (direndam atau disalai), dinamakan tengkawang, dan merupakan barang yang melulu untuk diekspor.

Berhubung tengkawang ini akhirnya melulu untuk diekspor, maka praktisnya atas penyerahan tengkawang yang sudah direndam/disalai tidak dipungut Pajak Penjualan dan pungutan hanya dilakukan atas pengumpulannya dan ini biasanya dikerdjakan oleh para pengumpul ketjil.

Pada umumnya tingkat pengetahuan mereka tentang Undang² Pajak Penjualan 1951 tidak begitu tinggi dan djuga dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penjualannya akan menimbulkan kesukaran-kesukaran, maka kepada mereka tidak dapat diserahkan tugas untuk memungut Pajak Penjualan sebagaimana disebut dalam Undang²nja.

Karenanya perlu ditundjuk **bukan pabrikan sebagai pihutang** Pajak Penjualan berdasarkan Peraturan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajan dan Pengawasan R.I. No. P.Pn. 2-1-15 Tahun 1964.

Dalam hal ini maka **pedagang (besar) tengkawang ditundjuk sebagai pihutang Pajak Penjualan** dan jumlah Pajak Penjualan didasarkan atas harga yang diterima oleh pengumpul.

Demikianlah pendelasan Keputusan Kepala Direktorat Pajak Tidak Langsung No. P. Pn. 1-7-8 Tahun 1965 tanggal 10 Nopember 1965 yang selanjutnya menetapkan besarnya Pajak Penjualan sepuluh perseratus (10%) dari harga yang diterima oleh pengumpul buah tengkawang.

Keputusan ini mulai berlaku pada penyerahan tengkawang yang dilakukan setelah **30 Nopember 1965**.

22. TUNDJANGAN HARI RAYA TAHUN 1966 BAGI PEGAWAI NEGERI/PEDJABAT NEGERA DAN BURUH SWASTA.

Dengan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1965 tanggal 22 Nopember 1965 telah ditetapkan pemberian tundjangan Hari Raya tahun 1966 Pegawai Negeri/Pedjabat negara sebesar Rp. 75.000,—.

Pegawai Negeri/Pedjabat Negara yang mendapat tundjangan tsb. adalah :

1. Pegawai Negeri Sipil yang digadji menurut PGPN 1961;
2. Pedjabat² Negara lain yang menerima penghasilan dari Kas Negeri;
3. Anggota Angkatan Kepolisian yang digadji menurut P.G.-Pol. 1961;
4. Anggota Angkatan Perang yang digadji menurut P.G.-M 1961;
5. Pegawai organik Daerah Otonom;
6. Pegawai bulanan/harian organik yang digadji berdasarkan PGPN 1961;
7. Penerima pensiun atau tundjangan yang bersifat pensiun sebagai :
 - (a) Bekas Pegawai Negeri Sipil;
 - (b) Bekas anggota Angkatan Kepolisian;
 - (c) Bekas anggota Angkatan Perang;

(d) Bekas pedjabat Negara lain yang menerima penghasilan dari Kas Negeri;

(e) Djanda dari mereka termaksud angka 1 s/d dan angka 7 huruf a s/d d tersebut diatas.

Pembayaran tundjangan Hari Raya ini dilakukan bersamaan dengan pembayaran gadji dan/atau pensiun c.q. tundjangan yang bersifat pensiun untuk bulan Desember 1965 kepada masing² yang berhak menerimanja.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dilakukan oleh Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia.

23. TUNDJANGAN HARI RAYA TAHUN 1966 BAGI BURUH PERUSAHAAN² SWASTA.

Dengan Keputusan Presidium Kabinet Dwikora R.I. tanggal 30 Nopember 1965 No. AA/C/136/1965 telah ditetapkan bahwa pengusaha Swasta diwajibkan memberikan tundjangan Hari Raya Tahun 1966 kepada buruhnja sedjumlah sekurang²n Rp. 30.000,—.

Besarnya tundjangan tersebut dimusjawarhkan antara buruh dan pengusaha dengan ketentuan bahwa djumlahnja sekurang²nja Rp. 30.000,—. Dengan persetujuan buruh tundjangan Hari Raya tersebut seluruhnja atau sebagian dapat diberikan dalam bentuk bahan² atau barang² yang termasuk kebutuhan hidup pokok buruh dan keluarganja. Bahan² dan barang² dinilai menurut harga pembelian pada bulan yang mendahuluija.

Jang berhak menerima Tundjangan Hari Raya ialah :

- (1) Buruh yang pada Hari Raya telah mempunyai hubungan kerdja tiga bulan dengan tidak terputus;
- (2) Buruh harian lepas yang pada Hari Raya mempunyai hubungan kerdja dengan pengusaha dan selama tiga bulan sebelumnya telah bekerja sedikitnja enampuluh hari;
- (3) Buruh musiman pada perusahaan² yang dalam tahun 1965 sudah diberikan tundjangan Hari Raya, yang pada Hari Raya masih bekerja pada perusahaan tersebut atau hubungan kerdjanya dengan perusahaan tersebut berakhir paling lama 25 hari sebelum Hari Raya, dan sudah bekerja 2 musiman sebelum Hari Raya.

Bilamana karena suatu perdjandjian, kelaziman ataupun keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat atau Daerah biasa dibayarkan tundjangan Hari Raya yang djumlahnja melebihi yang ditetapkan dalam peraturan ini, atau dan diadakan pemberian dalam bentuk lain, maka pembayaran atau/dan pemberian demikian tetap berlaku. Hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur oleh Menteri Perburuhan.

24. IBANAS AKAN BANTU PARA IMPOR TIR UNTUK MENGALIHKAN USAHANJA KE BIDANG INDUSTRI.

BAMUNAS baru² ini mendirikan Jajasan Industri Berdikari Bamunas (IBANAS) yang bertugas me-

itu para importir untuk mengalihkan usahanya ke bidang industri.

Sesuai dengan keputusan Pemerintah bahwa impor mulai tahun 1966 seluruhnya akan dilakukan oleh pemerintah atau Swasta atas nama Pemerintah, maka IBANAS telah mengajukan delapan matjam industri kepada Menteri Berdikari Pardede yang telah mendapatkan persetujuan Menteri. Kedelapan bidang industri itu yang dapat diusahakan oleh Swasta meliputi industri kaju, ban, es, tepung ikan, pengalangan, pembakaran kapur, genteng dan peradjudan. Pembinaan untuk projek² industri itu terutama mengenai devisa yang diperlukan untuk mengimpor bahan baku akan diperlukan lebih dari empatpuluh juta US dollar.

Demikian a.l. pendjelasan B.R. Motik, Ketua OPS yang merangkap anggota Pengurus Harian PT MUMAS dalam konperensi pers pada tgl. 3 Desember 1965.

25. PENERBANGAN INDONESIA-PAKISTAN.

Dalam rangka realisasi kerdjasama disegala bidang ususnya dibidang penerbangan sipil antara Indonesia dengan Pakistan, maka pada awal bulan Januari 1966 j.a.d. Indonesia akan mengirinkan suatu delegasi ke Pakistan dibawah pimpinan Menteri Perhubungan Udara Partono.

Keberangkatan Menteri dan rombongan ke Pakistan tersebut adalah sebagai follow-up dari Air Agreement yang telah dibitjarakan antara kedua negara di Pakistan beberapa waktu yang lalu.

Hubungan udara Djakarta-Pakistan ini diadakan untuk meletusnja peperangan antara India dan Pakistan serta adanya larangan dari Pemerintah India bagi pesawat Garuda untuk singgah di Bombay.

Demikian a.l. keterangan yang diberikan oleh Direktur Utama PN GARUDA Capt. Soedarmo kepada „Antara” dan Pusat Pemberitaan ABRI.

26. 1966 NUSA TENGGARA BARAT AKAN DIKSPOR DJARAK.

Dalam musim penghujan ini, oleh PT Sampas Trading Coy Ttd. di Ampenan, telah disebarkan bibit jarak sebanyak 3000 kg, yang terdiri dari jenis-jenis jarak Djepang, Kambodja dan India. Bibit jarak itu telah mulai ditanam pada tanah seluas 1000 HA di Lombok Barat, dimana diharapkan pada bulan Maret 1966 akan dapat dipetik bidji jarak sedjumlah 100 ton. Sebagian akan diolah menjadi minjak jarak yang telah diproduksi di Lombok untuk minjak minyak, olie, minjak tjat dsb., sedangkan yang 250 ton akan diekspor keluar negeri.

27. PERDJANDJIAN KREDIT PERBAIKAN MESIN TEKSTIL DITANDATANGANI.

Tanggal 29 Nopember 1965 bertempat di ruang sidang Departemen Perindustrian Tekstil telah ditandatangani penandatanganan kontrak pemberian kredit dari Djepang yang diwakili oleh Nichimen & Co.

Ltd. dan dari pihak Indonesia oleh Deperinteks. Penandatanganan kontrak tsb. dilakukan oleh Juzo Hamada selaku ketua perwakilan Nichimen & Co. Ltd. dan Pembantu Menteri Bidang Pembangunan Ir Safioen dari Pemerintah Indonesia.

Djumlah yang diberikan adalah seharga delapan djuta dollar dan merupakan sebagian dari seluruh djumlah yang telah didjandjikan jaitu sebanjak 15 djuta dollar. Pemberian kredit itu adalah dari rumusan hasil MUBESAN I bulan September j.l.

Kredit itu terdiri dari 3 unit waste spinning mill, 4 mesin persiapan pertununan dan 8 unit finishing, dan akan direliris lima bulan setelah penandatanganan kontrak.

28. BUAH APPEL INDONESIA.

Di Djawa Timur, ternyata dapat pula tumbuh pohon apel yang menghasilkan buah apel yang besarnya dan rasanya sama dengan apel dari Australia. Appel tersebut adalah kepunjaan seorang pemain olahraga yang menanam dikebunnya di Batu Daerah Malang.

29. ARMADA GARUDA DEWASA INI.

Pada dewasa ini P.N. GARUDA mempunyai armada yang terdiri dari pesawat jet Convair 990-A : 3 (tiga) buah; Electra (turbo-jet) : 3 (tiga) buah; Convair 440 : 3 (tiga) buah; Convair 340 : 8 (delapan) buah; Dakota 18 buah. Disamping lin² dalam negeri yang umumnya mempergunakan pesawat² type Dakota, Convair, Electra juga untuk lin luar negeri telah dibuka untuk lin Eropa disamping lin² Asia yang sudah ada dengan mempergunakan pesawat jet Convair 990A.

Untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat untuk menempatkan Garuda pada posisi internasional yang utama, sekarang ini dalam penyelesaian (telah dipesan) 4 (empat) buah pesawat full-jet type DC-8 yang diharapkan pada 1966 dua buah segera tiba, sedang sisanya ditunggu tahun 1967. Disamping itu sebuah pesawat Electra telah dipesan pula.

30. TARGET PENANAMAN KAPAS TAHUN 1968.

Target penanaman kapas telah ditetapkan jaitu 300.000 HA pada akhir tahun 1968, yang berarti akan menghasilkan kapas bersih l.k. 60.000 ton dalam setahun dan tjukup untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku kapas bagi pabrik pemintalan seluruh Indonesia. Disarankan supaya dari 300.000 HA ini pemerintah/PPN Serat mengusahakan dalam bentuk perkebunan seluas 100.000 HA, sedangkan sisanya 200.000 HA tjukup diusahakan oleh rakyat petani Swasta. Demikian a.l. saran Menteri Perindustrian Tekstil pada MUNAS Pertanian Rakjat j.l.

31. TARGET PRODUKSI PERHUTANI UNTUK 1966.

Dalam tahun 1966 oleh BPU Pertanian telah ditetapkan target dari hasil hutan sbb. : arang 6.000 ton, kulit kaju 2.000 ton, minjak kajuputih 40.000 liter,

terpentyn 20.000 liter, gondorukom 150 ton, getah pinus 3.500 ton, bambu (sebangsa minjak) 3.000.000 botor, lak sebanjak 200 ton.

32. PERSETUDJUAN DAGANG R. I. — HONGARIA.

Dengan Keputusan Presiden R.I. No. 353 tahun 1965 tanggal 17 Nopember 1965 telah ditetapkan pengesahan Persetudjuan Dagang Djangka Pandjang antara Republik Indonesia dan Republik Rakjat Hongaria jang protokolnja untuk tahun 1965, telah ditandatangani di Djakarta tanggal 15 April 1965, dan berlaku sampai tanggal 31 Desember 1967.

33. PROJEK KERDJASAMA INDONESIA-TJEKOSLOWAKIA.

11 (sebelas) projek² kerdjasama Indonesia-Tjekoslowakia jang sedang berdjalan adalah sbb.:

1. **Projek Semen Tonassa**, di Sulawesi Selatan, kerdjasama dengan Departemen Perindustrian Dasar, selesai tahun 1966 dengan kapasita 240.000 ton/tahun;
2. **Projek Equipment Tonassa**, di Sulawesi Selatan, kerdjasama dengan Departemen Perindustrian Dasar.
3. **Projek Industri Diesel**, di Djakarta, kerdjasama dengan Departemen Perindustrian Dasar.
4. **Projek Pembelian 2.500 gerbong Kereta Api**, di Pasuruan kerdjasama dengan P.N. BOMA.

5. **Projek Pembelian 2.000 gerbong.**
6. **Projek Pabrik Ban Mobil**, di Djakarta, kerdjasama dengan P.N. Intirub.
7. **Projek Pabrik Gula Bone**, di Sulawesi Selatan kerdjasama dengan Departemen Pertanian, selesai tahun 1967, dengan kapasita 30.000 ton/tahun.
8. **Projek Equipment P.L.N. (Tambahan)**, kerdjasama dengan Departemen Listrik & Ketenagaan.
9. **Projek Peralatan Angkatan Bersendjata**, kerdjasama dengan Kompartimen Pertahanan.
10. **Projek 3 Agriculture Units**, di Djakarta, kerdjasama dengan Departemen Pertanian.
11. **Projek pembelian 1.000 truk**, di Djakarta, kerdjasama dengan P.T. Immer Motor. Projek² jang sedang dalam taraf pemitjaran analisa adalah :
 1. **Djalan-raja Sumatra**, kerdjasama dengan Departemen Binamarga.
 2. **Aspal Buton**, kerdjasama dengan Departemen Binamarga.
 3. **Peralatan² Listrik**, kerdjasama dengan Departemen Listrik & Ketenagaan.

Ketiga projek ini telah disetujui dengan mendahulukan prioritas oleh Wakil Perdana Menteri III Dr. Chairul Saleh. Demikian a.l. Biro Menko UPPENAS.

(ANTAR)

P. T. KAMISAIYO

Kantor Pusat : Kampung Nias Lima 33,
PADANG — SUMATRA

Alamat kawat : KAMISAIYO — PADANG

Kantor Tjbang : DJAKARTA

Ekspor : Kulit kina — Kaju (Timber) — Kopi — Karet Cassiavera
dll. hasil bumi Indonesia.

Perkebunan : Kina di Bukit Gompong dan Talug Gunung —
Solok - Sumatra Barat.

Import : Berbagai matjam barang.

Interinsuler :

Bank : Bank Negara Indonesia Unit III
Bank Dagang Negara.

Varia berita singkat:

Ekonomi/Perdagangan Internasional

1. PERDAGANGAN SEDUNIA TAHUN 1964 MENINGKAT: 2 KALI LIPAT DALAM HASIL PRODUKSI, 12% DALAM NILAINJA.

Volume perdagangan sedunia meningkat hampir dua kali lipat dari tahun jang lalu mengenai produk-sinja, sedang dalam nilainja meningkat 12 persen hingga mendjadi 169,000 djuta dollar.

Demikian laporan tahunan GATT jang dimuat dalam „London Financial Times” baru² ini.

Kenaikan ini disebabkan berhubung ekspor dari negara² industri meningkat dengan 14 persen dengan djumlah 109,290 djuta dollar terutama mengenai pendjualan barang². Ekspor dari Inggris mengenai barang² ini hanja naik dengan 5%, sedang di-sektor barang² modal penting tak ada kenaikan sama sekali.

Laporan tahunan GATT itu selandjutnja menja-takan, bahwa antara 1958 dan 1964 djumlah ekspor barang² dari negara² industri telah meningkat dengan 74 persen. Dari Inggris hanja meningkat dengan 31 persen, sedang mengenai djumlahnja menurun dari 17 persen dalam tahun 1958 mendjadi 13 persen dalam 1964.

Mengenai perdagangan setempat, laporan GATT itu menjatakan, bahwa hal itu tampak djuga menan-djak dalam tahun² belakangan ini, tidak sadja bagi ke-enam negara tapi djuga bagi negara² E.F.T.A. dalam 1963 dan 1964.

Mengenai defisit jang terdjadi di-negara² jang telah madju pada tahun 1963 dan 1964, laporan itu menjatakan, bahwa hal itu disebabkan oleh kele-bihan impor dari negara² blok timur terhadap eks-pornja kenegara² tersebut. Defisit itu tahun jang lalu mentjapai 890 djuta dollar.

Ekspor barang² jang meningkat 14 persen, itu mentjapai 95,700 djuta dollar, jang mengakibatkan djumlah ikut sertanja barang² dalam perdagangan dunia mentjapai puntjak jang baru tahun jang lalu yakni 57 persen dibandingkan dengan 54% tahun 1963. Mengenai harga dari barang² itu, menurut laporan tadi kenaikan hanja 1 persen antara 1963 dan 1964.

Selandjutnja laporan GATT itu menguraikan fak-tor² jang menjebabkan meningkatnja perdagangan sedunia itu dalam tahun 1964, dikemukakan kenaik-an disebabkan terutama oleh tjepat meningkatnja

penghasilan barang di-negara² industri, perobal-jang tertentu dalam situasi pasaran mengenai berb-bahan makanan, dan achirnja meningkatnja kem-puan mengimpor dari negara² non-industri. Da-pada itu di-negara² industri tahun jang lalu im-untuk obat², bidji² metal, kaju meningkat luar bi-

Perdagangan negara² non-industri dipasaran-gara² industri merosot dari 57 persen dalam ta-1963 sampai 46% dalam tahun 1964. Ekspor-rang² dari negara² industri jang meningkat 9% da-tahun 1963 naik lagi dengan 15% tahun jang-hingga mendjadi 52,500 djuta dollar. Ekspor-negara² non-industri dari negara² industri itu te-dari terutama barang² modal, barang² setengah d-untuk diolah lebih landjut.

Demikian laporan tahunan GATT.

2. PRODUKSI TEH SEDUNIA

Hasil produksi teh sedunia dalam tahun 1964 mentjapai djumlah 1642 djuta pon, sedang ang-produksi tahun² sebelumnja adalah sbb. : tahun 1963 : 1.632 djuta pon, tahun 1962 : 1.642 djuta pon, tahun 1961 : 1.644 djuta pon dan tahun 1960 : 1.642 djuta pon.

Bagian produksi Indonesia pada produksi teh dunia tersebut untuk tahun 1964 telah merosot mendjadi 5.3% atau 90 djuta pon, sedang dalam tahun 1960 Indonesia menghasilkan sebanjak 6.6% atau 102 djuta pon. Tapi dibandingkan dengan tahun 1963 produksi teh Indonesia untuk tahun 1964 mengalami kenaikan sedikit, i.i. sebanjak 5 djuta pon (tahun 1963 produksi Indonesia adalah 85 djuta pon).

Sementara itu dalam tahun 1960 angka ekspor teh Indonesia tertjatat sebesar 80 djuta pon. tahun 1963 : 73 djuta pon dan tahun 1964 : 76 djuta pon. Dibandingkan dengan tahun 1960, persentase ekspor teh Indonesia pada ekspor teh sedunia untuk tahun 1964 mengalami kemerosotan sebab persentase tahun 1960 adalah sebesar 6.8% sedang tahun 1964 sebesar 6.1%.

Konsumsi teh sedunia.

Sementara itu konsumsi teh sedunia bertam-sedikit, j.i. dari 125.4 djuta pon mendjadi 132.4 djuta pon untuk tahun 1964. Angka² jang mentjukkan kenaikan konsumsi teh di-negara² impor teh di Asia adalah sbb. : tahun 1962 konsumsi teh sebesar 137 djuta pon, tahun 1963 : 140 djuta pon, tahun 1964 : 145 djuta pon.

Konsumsi teh naik dengan hebatnja di Uni Sovjet, tahun 1962 Uni Sovjet mengkonsumir 36 djuta pon teh, tahun 1963 : 53 djuta pon dan tahun 1964 : 55 djuta pon.,

Pemasaran teh Indonesia.

Mengenai pemasaran teh Indonesia, dikemukakan bahwa sebanyak 3.985 djuta pon teh untuk tahun 1964 telah dilelangkan di Antwerpen, sedang untuk tahun 1963 dilelangkan sebanyak : 5,502 djuta pon. Lanjutnja mengenai harga rata² pada umumnya mengalami gontjangan² sbb. : dari 40.04 pence/per pon sampai 32.91 pence/per pon untuk tahun 1961, tahun 1963 : dari 3599 pence sampai 30.14 pence,

tahun 1963 : dari 31.15 pence sampai 26.01 pence, tahun 1964 : dari 28.89 pence sampai 23.91 pence.

Pada pelelangan pertama tahun 1961 harga rata² adalah 37.44 pence/per pon sedang pada pelelangan terakhir tahun 1964 adalah : 26.05 pence/per pon.

Sementara itu harga tertinggi yang tertjatat untuk teh Indonesia selama 4 tahun, (1960-1964) adalah 40.04 pence/per pon pada bulan Mei tahun 1961. Sedang harga terendah yang tertjatat untuk teh Indonesia adalah 23.91 pence pada bulan Djuli 1964.

Demikian angka² statistik menurut „Market Review” hasil² Tropis yang dikeluarkan oleh La So-reunies (Socomabel) Antwerpen.

(Antara).

Ingin memiliki,

BUKU PENUNTUN PERDAGANGAN TAHUN 1966 No. 1

Pesanan dapat diadjukan, kepada :

DIREKTORAT MARKETING DAN RESEARCH
Tanah Abang Timur 87, Djakarta.



Djl. Bandengan Utara 89,
DJAKARTA-KOTA

Djepang dan Masalah Impor Bahan Makanan

Rakjat Djepang kini memenuhi kebutuhan pangsanya dengan bahan² pangan yang diimpor dari berbagai bagian dunia, yang semakin banjak djumlahnja. Politik mereka yang tradisional untuk tetap dapat mentjukupi sendiri kebutuhan mereka disegala bidang, telah terantjam oleh semakin berkurangnya tenaga² penggarap tanah di desa² dan kemajuan yang lebih lambat dalam modernisasi di-desa² daripada di-kota² industri.

Impor² bahan makanan kemungkinan akan semakin melondjak, mengingat taraf hidup yang semakin baik di Tokio dan Djepang membuka pasar²nja lebar² melalui liberalisasi perdagangan Luar Negerinja.

Sop katjang tjampur daging masakan tradisional Djepang, dewasa ini dibuat dari katjang kedelai yang diimpor dari RRT melalui Amerika. Dengan demikian saus ketjap, merupakan bumbu yang lux bagi orang² Djepang karena produksi katjang kedelai dalam negeri telah menurun.

Djepang djuga mengimpor sedjumlah besar bidjih² minjak, termasuk katjang tanah dan minjak² bidjih yang pemakaiannya semakin bertambah. Impor beras, makanan pokok bagi kebanyakan rakjat Djepang, menurun sampai mentjapai djumlah yang hampir tidak berarti pada awal tahun 1960, ketika itu bahkan telah dibitjarakan mengenai kemungkinan untuk mengeksport dimasa mendatang beras Djepang. Tetapi kemudian impor beras naik lagi, sampai mentjapai 700.000 ton dalam tahun 1965.

Para importir setempat berkejakinan, bahwa impor beras untuk tahun 1966 akan mentjapai 1.000.000 ton dan kemungkinan beras ini akan didatangkan dari Taiwan, AS, RRT, Birma, Muangthai, Kambodja, Vietnam Selatan, Korea Selatan, RPA, dan Spanjol.

Impor gandum untuk membuat roti, yang semakin digemari oleh rakjat Djepang yang menjukai tjara hidup Barat, ataupun tunuk untuk membuat misoa, makanan utama lainnya bagi rakjat Djepang, djuga bertambah dari 2.700.000 ton dalam tahun 1961 sampai 3.300.000 ton dalam tahun 1964. Gandum² ini didatangkan terutama dari AS, Kanada dan Australia.

Pemerintah Djepang kini membatasi impor² mentega, kedju dan hasil² yang terbuat dari susu lainnya, dari Australia, Selandia Baru, Denmark, dan negara² lain, untuk melindungi industri susu dan mentega dalam negeri yang masih dalam taraf pertumbuhannya.

Tetapi tekanan kebutuhan dalam negeri semakin keras, sehingga impor barang² itu naik dari 9.000.000.000 yen dalam tahun 1962 sampai 12.000.000.000 yen dalam tahun 1964. Impor² daging, termasuk daging sapi dan daging babi, hampir tiga kali lipat, dari 36.027 ton dalam tahun 1962 sampai 92.250 ton dalam tahun 1964. Impor² daging domba, terutama dari Selandia Baru, mendjadi lebih dari dua kali lipat selama periode itu, sampai mentjapai 58.151 ton tahun 1964, sementara impor daging kuda, terutama dari Argentina, naik dengan l.k. lima kali lipat sampai mentjapai 26.396 ton.

Daging domba dan daging kuda setjara prinsipil digunakan untuk menghasilkan daging yang dimasak, termasuk sosis yang mendjadi sangat terkenal bagi kaum ibu di Djepang, karena nilaigizinja dan hematnja.

Harga² daging, terutama daging sapi, di Tokio menandjak dengan keras selama tahun 1965, karena kebanyakan para petani Djepang sekarang tidak lagi mempergunakan sapi² untuk mengerdjakan tanahnya berkenaan dengan mekanisasi pertanian. Perkembangan impor daging dari Australia dan dari mana sadja.

Ikan yang pemakaiannya di Djepang hampir seluruhnja dapat dipenuhi sendiri, dewasa ini sudah mulai diimpor dalam djumlah yang besar. Hampir 80 persen dari udang yang dimakan oleh orang² Djepang sekarang diimpor dari Spanjol, RRT, Hongkong dan Meksiko. Djenis² lain dari hasil laut yang diimpor djuga ialah sebangsa ubur² dari Tiongkok sebangsa ikan dari Spanjol, sedjenis ikan dari Uni Sovjet, sedjenis ikan dari Korea dan agar² dari Djerman Barat.

Perusahaan² perikanan Djepang, yang menjari ikan dalam salem di Lautan Pasifik sebelah utara dan ikan paus di Lautan Kutub Selatan, membeli 11.000 ton ikan salem segar yang ditangkap oleh nelajan² Amerika diperairan Alaska dalam tahun 1964, dan merentjanakan untuk mengimpor daging ikan paus dari Norwegia tahun ini.

Rentjana² djuga sedang disusun untuk mengimpor sedjenis ikan kering dari Korea Setatan, dan ikan² lainnya dari Tiongkok dan sedjenis ikan istimewa dari Uni Sovjet, yang merupakan makanan ikan². Djepang djuga mengimpor lebih kurang 1.500.000 ton gula mentah tiap tahunnja dan djumlah itu diduga akan naik karena produksi gula bit dalam negeri terbatas dan mahal harganya (Antara Spektrum).

Daun tendu

untuk

ROKOK BIDI^{*)}

Saleem Ahmed, seorang anakmuda Pakistan bekerdja sebagai budjang dirumah seorang an saja di Karachi mempunyai suatu kegema- jaitu mengisap rokok „b i d j i” (batja i) sematjam rokok rakjat jang bentuknja pir serupa dengan rokok „kretek” di Indone- tetapi djauh berbeda dalam bahan² untuk buatkanja dan oleh karena itu djuga dalam ra-

djika ia sedang menikmati rokoknja itu maka ganlah anda tjoba² menegor atau menjapa Pasti tidak akan dindahkannya sebab ia se- menikmati sesuatu jang seolah² sudah me- kan tjandu bagi dia.

tetapi pada akhir² ini ia selalu kelihatan lesu. bnja ialah karena ia tak bisa lagi mendapat- rokok jang digemarinja itu karena pembua- rokok rakjat itu telah disetop. Pembuatan k itu dihentikan karena pemerintah Pakis- aru² ini telah memutuskan untuk menjetop sekali impor daun „t e n d u” dari India biasanja digunakan untuk pembungkus ro- rokok tersebut.

an sebagai akibat dari keputusan pemerintah aka Salem Achmed bersama² dengan ratu- ibu lagi orang sebangsanja jang sedjak ber- n² telah biasa menikmati rokok tersebut ang tak obahnja seperti orang „deman- pakarena sesuatu jang sangat mereka gemari ah² direnggutkan dari mereka setjara tiba².

benarnya djauh sebelum konfrontasi ber- ata baru² ini pemerintah Pakistan telah ambil langkah² seperlunja untuk menje- op r daun „tendu” dari India berdjumlah tak ku- dari 80 djuta rupees (16 dollar AS) setahun. ne impor daun tendu itu kemudian setiap i setjara berangsur-angsur dikurangi dan g akhir djumlahnja adalah seharga 40 djuta s (8 djuta dollar AS).

an baru² ini pemerintah Pakistan Timur de- resmi telah mengumumkan larangan daun jang diimpor dari India untuk membuat s bidi tersebut mulai tanggal 1 Desember .Sebelum mengadakan larangan tersebutintah tak pula lupa untuk mengambil lang- seperlunja untuk menampung akibat² lara-

ngan tersebut, terutama mentjari suatu bahan lain sebagai pengganti daun tendu tersebut. Demi- kianlah beberapa waktu jang lalu telah dibentuk panitia khusus jang terdiri dari tiga orang ahli. Panitia itu dalam laporannya kepada pemerintah berkesimpulan bahwa sematjam daun jang terke- nal sebagai daun „k u m b i” dan banjak tumbuh di Pakistan Timur dapat dipergunakan sebagai pengganti daun „tendu”. Akan tetapi kemudian timbul suara² bahwa daun tersebut mengandung zat² jang merusakkan kesehatan. Walaupun Menteri Propinsi Pakistan Timur Untuk Perda- gangan dan Industri, Abdul Basith, mengumum- kan dengan resmi bahwa hasil penjelidikan il- miah menundjukkan bahwa daun kumbi bersih dari zat apapun djuga jang dapat merusakkan kesehatan, namun pentjandu rokok bidi rupa- nja tidak menundjukkan entusiasme jang begitu besar untuk memakai daun kumbi sebagai pengganti daun tendu.

Sebenarnya djika ditindjau lebih dalam soal- nja bukanlah apakah daun kumbi merusakkan kesehatan atau tidak. Sedjak dari nenekmojang- nja mulai dari beratus² tahun jang lau, pe- tjandu² rokok rakjat di Pakistan telah biasa mengisap rokok bidi jang dibungkus dengan da- un tendu. Sekarang mereka dengan tiba² disu- ruh setjara tak langsung merobah kebiasaan tersebut. Walaupun mereka mengetahui seda- lamnja sebab² pelarangan impor daun dari India itu, namun kegemaran mereka akan rokok bidi rupanja tak dapat mereka bungkam begitu sadja.

Penjetopan impor daun tendu punja akibat jang luas.

Akibat lain dari penjetopan impor daun ten- du dari India itu ialah hilangnya mata pentjaha- rian dari 350.000 pekerdja pengguling rokok bidi, karena pabrik² dimana rokok itu dibuat, jang djumlahnja di Pakistan Timur sadja tak kurang dari 200 buah, telah terpaksa gulung ti- kar.

Demikianlah persoalan daun tendu dan ro- kok bidi itu telah merupakan persoalan besar. pula di Pakistan terutama di Pakistan Timur.

Bersambung ke hal. 39

P. N. DHARMA NIAGA

IMPOR : Mesin² untuk Pertjetakan — Industri — Pertanian — Perkebunan — Tekstil.

Mesin² Perkakas — Pendingin — Minjak Kelapa — Pompa² dan Mesin untuk Pembangunan.

Alat² Besar — Kereta Api — Mesin² Pertambangan Clark Forklift
Mesin² DIESEL/Generating set — Alat² RADIO/elektronik/Tel komunikasi dan motor² listrik.

PERDAGANGAN UMUM : Dalam Negeri/Antar Pulau.

INSTALASI : Telepon dan listrik dengan tenaga^c Ahli.

PERBENGKELAN : Service dan pemasangan mesin.

Kantor Pusat :

Djalan Tanah Abang Barat 6 - 8 - 10 — Djakarta.
P.O. Box 2028 — Tel. 47557 - 47577 - 49978 - 41974
Telex 292

Kantor Tjabang Djakarta

Djalan Djembatan Batu 50 — Tel. 22041 - 22042 - 22043 - 22044
Djakarta Kota.

Tjabang-Tjabang :

BANDUNG — SEMARANG — SURABAJA — MEDAN
PONTIANAK — PALEMBANG — TJIREBON — JOGJ
KARTA — MALANG — DJEMBER — BANDJARMASIN
MAKASSAR — MENADO — AMBON — DENPASAR
BANDA ATJEH — PADANG dan PAKANBARU.

Adjaran² Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno

KE : VII

BERHUBUNG DENGAN TULISANNJA

Ir. A. BAARS



embatja sudah mengetahui semuanya :

r. A. Baars jang kita semua mengenalnja sebagai
h seorang penjebar benih Marxisme di Indonesia,
g berhubung dengan aksi revolusioner dalam ta-
i 1917 dikeluarkan dari djabatan Gupermen, jang
ah enam tahun ini tidak boleh mengindjak Indo-
ia jang sesudah djatuhnja ia punja externering
tas masuk dalam dinasnja pemerintah Soviet ...
A. Baars ini belum selang berapa lama telah me-
is beberapa karangan dalam surat-surat kabar
I.D. de Preangerbode" dan „Surabajaasch Han-
sblad", dengan ini menundjukkan, bahwa ia kini
i pengalaman-pengalamannja dinegeri Rusia, su-
i „bertobat" dari faham, jang bertahun-tahun
nerapi budi-akalnja : komunisme. Berkali-kali ia
am tulisan itu memperingatkan kita, djanganlah
i mendekati komunisme itu; berkali-kali ia me-
takan, bahwa apa jang ia alami di Rusia itu ha-
lah kekalutan dan kesengsaraan sahadja. Dan
gan utjapan, bahwa ia punja „meegevoel en sym-
bie", ia punja rasa tjinta terhadap pada penduduk
onesia masih „belum kurang kekuatannja" (?);
gan utjapan, bahwa ia masih sahadja berpendapat,
wa penduduk Indonesia itu „harus menaik tempat
g lebih tinggi dari pada apa jang sekarang sudah
japai", — maka ia bermaksud mejakinkan kita,
wa ia punja peringatan dan ia punja nasehat itu
jalah lahir dari pada hati jang sesutji-sutjinja
ja.

Marilah kita terus terang sahadja : Kita t i d a k
dapat kejakinan, bahwa tulisan-tulisan itu ke-
nja ialah dari hati jang sutji; t i d a k men-
at kejakinan, bahwa tulisan-tulisan itu keluarnja
h dari pada „meegevoel en sympathie" terhadap
a kita jang „belum kurang kekuatannja"; t i d a k
dapat kejakinan, bahwa tulisan-tulisan bekas
unis ini, jang bukannya sahadja sekarang anti-
unisme, tetapi djuga anti-sosialisme, dan djuga
-marxisme dalam umumnja, sebagaimana jang
dirasakan diantara kalimat-kalimatnja, ada suatu
fessie atau pengakuan jang sesutji-sutjinja dari
a seorang manusia, jang lebih dari sepuluh tahun
djadi pengikutnja, ja, salah seorang pahlawannja

faham marxisme itu sebagai faham, de marxistische
leer ansich; — kita t i d a k mendapat kejakinan,
bahwa tulisan ini, jang keluarnja dari penanja suatu
orang, jang dulu tiada henti-hentinja ikut menuntut
k e m e r d e k a a n tanah-air kita dan rakjat kita,
tetapi jang sekarang didalam karangannja itu tidak
suatu kali menjebutkan perkataan merdeka itu, me-
lainkan hanja mengatakan, bahwa kita ini „harus
menaik tempat jang lebih tinggi dari apa jang sudah
sekarang tertjapai" sahadja, ada terpikul oleh pera-
saan terhadap pada kita jang sama dengan perasaan,
jang mewahjuinja dalam tahun-tahun, tatkala ia
didampinginja H. Sneevliet mendjadi salah seorang
penuntut kemerdekaan kita jang seluas-luasanja itu
adanja.

Dan tidaklah pengiraan kita ini mendjadi diper-
kuat, kalau kita mengadjukan pertanjaan pula, apa
sebab Ir. Baars, jang katanja mengarahkan kata-kata-
nja itu terhadap pada kita, tidak memuatkan tulis-
annja itu didalam surat-surat kabar Indonesia, tetapi
dalam surat-surat-kabar fihak sana, fihak jang tak
sesuai dengan kita, fihak jang merintangji kita, fihak
jang memusuhi kita? Tidakkah pengiraan kita ini
diperkuat, tidakkah kita pantas menaruh sjak-wa-
sangka atas objectiviteitnja tulisan itu, kalau kita
melihat, bahwa Ir. Baars hanja menjebutkan d j e l e k n j a
dan bangkrutnja pemerintahan komunis
sahadja, dan ia, tiada satu perindahan atau peng-
hargaan sama sekali atas madjunja perguruan di
Rusia, madjunja pendidikan badan, madjunja pen-
didikan nasib kaum Jahudi dan lain-lain sebagainja,
jang djuga sudah diakui terang-terangan oleh lawan-
lawannja faham komunisme itu?

Bahwasanja ... kita, kaum nasionalis, jang bukan
kaum bolshevis, jang tidak memeluk faham komunis-
me, jang djuga mengetahui, bahwa faham pemerin-
tahan Sovjet itu dalam banjak hal sudah membukti-
kan tjelaka dan melesetnja, — akan tetapi jang untuk
a d i l n j a perkara, djuga tidak mau membutakan
akan beberapa hal-hal kemandjuaan, jang pemerintah-
an Sovjet itu sudah bisa menjapainja dengan hasil
jang baik, sebagai umpamanja kemandjuaan penga-
djaran dan lain sebagainja tahadi itu, kemandjuaan

mana dengan bukti² atau angka² telah dinjatakan pula oleh orang-orang yang djuga datang ke Rusia, — kita menaruh sjak-wasangka dan kita bertanja, apakah barangkali tidak ada lain-lain hal yang menggojangkan penanja Ir. Baars mengeluarkan kritiknya terhadap suatu sistim dan faham, yang menjadi kejakinannya, iktikadnja, credonja bertahun-tahun lamanya itu. Kita, yang berdiri ditengah-tengah padang perdoangan merebut keadilan, hanjalah boleh memakai ukuran pengadilan itu pula terhadap pada apa sahadja, d j u g a terhadap pada komunisme, d j u g a terhadap pada hasil atau tidaknja pekerjaan Soviet-Rusia adanja.

Terhadap pada keadaan di Rusia ini, memang hampir semua kabar kurang adil. Terutama dizaman mula-mulanja Soviet-Republik itu berdiri, tatkala berdjuta-djuta manusia kelaparan, tatkala hampir semua bagian pergaulan-hidup disitu katjau susunan-hadap pada „prakteknja” faham Marxisme itu, maka maka hanja sedikitlah manusia yang menunjukkan sikap kemanusiaan pula. Beberapa waktu yang lalu saja menulis :

„Untuk a d i l n j a kita punja hukuman terhadap pada „prakteknja faham Marxisme itu, maka haruslah kita ingat, bahwa „failliet” dan „kalang kabut”nja negeri Rusia itu adalah dipertjepat pula oleh penutupan atau blokkade oleh semua negeri-negeri musuhnja : dipertjepat pula oleh hantaman dan serangan pada empatbelas tempat oleh musuh-musuhnja sebagai Inggeris, Perantjis, dan Djenderal-djenderal Koltchak, Denikin, Yudenitch dan Wrangel; dipertjepat pula oleh anti-propaganda yang dilakukan oleh hampir semua surat-kabar diseluruh dunia”.

Didalam pemandangan kita, maka musuh-musuhnja itu p u l a harus ikut bertanggung djawab atas matinja limabelas djuta orang yang sakit dan kelaparan itu dimana mereka menjokong penjerangan Koltchak, Denikin, Yudenitch dan Wrangel itu dengan harta dan benda : dimana umpamanja negeri Inggeris, yang menjokong membuang berdjuta-djuta rupiah untuk menjokong penjerangan² atas diri sahabatnja yang dulu itu, telah „mengotorkan nama Inggeris didunia dengan menolak memberi tiap-tiap ban tuan pada kerdja-penolongan” sisakit dan silapar itu; dimana Amerika, di Rumania, dan Hongaria pada saat bentjana itu pula, oleh t e r l a l u b a n j a k n j a gandum, orang sudah memakai gandum itu untuk k a j u b a k a r, sedang dinegeri Rusia orang-orang didistrik Samara makan daging anaknja sendiri oleh karena l a p a r n j a.

Bahwa sesungguhnya : luhurlah sikapnja H. G. Wells, penulis Inggeris yang masjhur itu, seorang yang bukan komunis, dimana ia dengan tak m e m i h a k p a d a s i a p a d j u g a, menulis bahwa, umpamanja kaum bolshevik itu „tidak dirintang-rintang, mereka barangkali bisa menjelesaikan suatu eksperimen (pertjobaan) yang maha besar faedahnja bagi peri-kemanusiaan.... Tetapi mereka dirintang-rintang”.

Akan tetapi bagaimanakah sikap kita, kaum nasionalis terhadap pada sosialisme atau komunisme itu dalam umumnya?

Sosialisme, sosial-demokrasi, komunisme ada suatu reaksi, suatu faham-perlawanan terhadap pada kapitalisme, suatu faham-perlawanan yang dilahirkan oleh kapitalisme itu djuga. Ia adalah anaknja kapitalisme, tetapi ia adalah pula suatu kekuatan yang mentjoba menghantjurkan kapitalisme itu djuga. Tidak bisa berada dalam sesuatu negeri, dimana kapitalisme belum berdiri, dan ia t e n t u ada suatu negeri, djikalau negeri itu mempunyai aturan kerahulan, ia t e n t u ada suatu negeri, djikalau negeri itu susunan pergaulan-hidupnja ada k a p i t a l i s t i s.

Ia dalam hakekatnja bukanlah bikinannya beberapa orang „penghasut”, bukanlah anggautanja beberapa orang „penusuk” atau „pengadu”, bukanlah buah akalnja Karl Marx atau Friderich Engels atau Saint Simon atau Proudhon atau Lassalle, — ia adalah bikinannya, buahnya kapitalisme sendiri. Ia adalah „penghasut-penghasut”, „pengadu-pengadu” atau „penusuk-penusuk” itu kerdjakan; apa jang Karl Marx, Friderich Engels, Lassalle d.l.l. adakan, hanjalah b a n g u n n j a dan t j a n j a vorm dan m e t o d e n j a reaksi terhadap pada faham-perlawanan itu sahadja adanja. Sebagai suatu bajangan yang ikut kemana-mana, sebagai suatu musuh yang membuntuti lawannya ketiap-tiap temannya, maka pergerakan sosialisme atau komunisme itu didapatkan dimana sahadja kapitalisme terdapat. Kapitalisme dan sosialisme adalah dua musuh t e r t a l i k a n satu sama lain.

Dan begitulah, maka, walaupun sosialisme atau komunisme itu diperangi sehaibat-haibatnja atau tindas sekeras-kerasnja, walaupun pengikut-pengikutnja dibui, dibuang, digantung, didrel atau dibunuh, manakan djuga: walaupun oleh penindasan yang keras dan pemerangan yang hebat ia kadang-kadang kalah-olah-olah bisa binasa dan tersapu sama sekali, maka tiada henti-hentijnalah ia muntjul lagi dinegeri-kapitalistis, tiada henti-hentijnalah ia membikin gelombang-pornja kaum yang dimusuhinja, menjatakan dirinya dalam riwayat dunia, sebagai ditahun 1848, ditahun 1871, ditahun 1905 dan ditahun 1917, — tiada henti-hentinja ia memperingatkan djuru-riwayatnya menulis tambonja negeri-negeri Perantjis, Djepang, Inggeris, Rusia, Amerika, dan lain-lain kapitalistis didalam abad kesembilanbelas dan abad kedua puluh. bahwa riwayat dunia-kapitalistis, tak dapatlah terdjikalau riwayat itu tidak dihubungkan dengan riwayatnja dan pengaruhnja pergerakan sosialisme atau komunisme tahadi. Selama kapitalisme sendiri belum lenjap, selama sumber-asalnja sosialisme atau komunisme sendiri masih mengalir, selama aturan-aturan memeras tenaga dan kehidupan kaum buruh belum berhenti, maka reaksi diatasnja yang berupa pergerakan kaum buruh itu tidaklah bisa dihilangkan pula adanja. Karena itu maka tak hairanlah bahwa dinegeri-negeri Asia, dimana kapitalisme sudah mulai berkembang, misalnja dinegeri Djepang, Tiongkok, India dan lain-lainnja, timbulah pula suatu pergerakan kaum buruh yang sosialistis atau komunistis sifatnja; masuknja kemodalan di Asia diikuti oleh masuknja faham sosialisme dan ke-

ne. Pergerakan komunisme Tiongkok dibawah pimpinan Li Ta Chao, pergerakan sosialis Djepang awah pimpinan Suzuki, kaum bolshevik India jang ndjurkan oleh Manabendra Nath Roy, itu semua adalah suatu reaksi terhadap pada kapitalisme dan imperialisme jang mulai subur dinegeri-negeri itu, g makin lama makin berkembang dan mendjalar. n walaupun pergerakan kaum buruh Tiongkok itu i sudah hampir tersapu, walaupun hidupnja di epang sangat dirintang-rintang oleh wet-wet dan ran-aturan, walaupun ia di India belum mentjapai gkatan jang tinggi, walaupun dimana-mana diada i propaganda anti sosialisme dan anti-komunisme, maka pastilah ia esok lusa hidup lagi dan berdiri i. bergerak lagi disana dengan lebih giat dari pada g sudah; madjunja industrialisasi dan imperialisme boleh tidak p a s t i menjebakkan madjunja kisi diatasnja djuga.

Dan di Indonesia? Dinegeri tumpah-darah kita? onesiapun tak akan hindar dari pada djurusan-rusan atau tendenz-tendenz jang dilalui oleh geri-negeri lain. Indonesiapun tak akan hindar i pada s o c i a a l - e c o n o m i s c h e a e d e s t i n a t i e, jang djuga sudah mendi nasibnja negeri-negeri Asia jang lain; tak akan a hindar dari pada keharusan-keharusan jang su i pula menetapkan djalan-djalannja susunan per- dan-hidup negeri-negeri lain, jakni keharus-keharusannja hukum e v o l u s i, artinja: Indone- d j u g a akan menaiki semua tingkat-tingkat unan pergaulan-hidup jang sudah dinaiki oleh ne- i-negeri itu; — Indonesia d j u g a akan me-

ninggalkan tingkat susunan pergaulan-hidup jang sekarang ini, dan akan naik keatas tingkat susunan pergaulan hidup jang kemudian, masuk kedalam zaman kepabrikan, masuk kedalam zaman kapitalisme jang sebenar-benarnja, sebagaimana jang sekarang memang sudah kentara adanja. Indonesia oleh karena itu d j u g a tak luput mengenali „pengikutnja” kapitalisme itu; suatu pergerakan jang berazaskan sosialisme atau komunisme, sebagaimana jang memang sudah kita alamkan permulaannja pula.

Dan djika diperhatikan dengan djalan penjelidikan kita sekarang ini, djikalau diperhatikan dengan kita punja analisa sekarang, maka, walaupun pergerakan buruh dan tani itu dirintang atau ditindas sekeras-kerasnja, walaupun perkataan komunisme sekarang sudah sama artinja dengan Digul, maka pastilah pergerakan ini, — entah kapan —, akan muntjul lagi dan muntjul lagi selama kapitalisme masih ada di Indonesia, pastilah saban-saban lagi timbul reaksi ini timbul, tidaklah dapat dikatakan sekarang atau dikira-kira lebih dulu, oleh karena ia tergantung dari pada sikapnja kaum jang dimusuhi, akan tetapi bolehlah dipastikan lebih dulu, bahwa, selama kapitalisme dan imperialisme itu masih ada, pasti reaksi itu a k a n datang.

Akan tetapi, marilah kita kembali lagi pada jang kita hendak selidiki; sikap kita, kaum nasionalis, kaum kebangsaan, terhadap pada sosialisme atau komunisme itu.

Penjelidikan soal ini akan saja uraikan dalam karangan jang akan datang.

„Suluh Indonesia Muda”, 1928

mbungan hal. 35

Akan tetapi pedagang² Pakistan jang terkenal it rupanja tidak tinggal diam dan terus mear otak mereka untuk memetjahkan pesoa- tersebut. Seorang dari mereka rupanja telah lihat suatu titik terang jang bersinar dari sua- negara jang setjara potensiil terkenal sebagai jara jang kajaraja akan bahan². Negara terse- tak lain tak bukan adalah negara jang pag erat hubungannja dengan Pakistan dan jang nanja sangat populer dan dekat sekali dengan i rakjat Pakistan sekarang ini jaitu : I n d o e s i a.

Vohra, demikian nama pedagang tersebut be- apa hari jang lalu telah datang kepada SA- DJI, Atase Perdagangan kita di K.B.R.I. Ka- hi dan menjatakan bahwa ia telah menerima itu tjontoh daun dari seorang temannja di In- nesia jang sebenarnja adalah daun tendu. Pada kesempatan itu ia menjatakan hasratnja untuk ngimpor daun tersebut dari Indonesia.

Berita bahwa di Indonesia banjak terdapat in „tendu” rupanja telah tersiar luas pula pada angan pedagang² Pakistan lainnja. Sehubu- n dengan itu, maka Sanadji sekarang hampir ap hari dibandjiri surat² dari pedagang² tsb. g ingin mendapatkan keterangan lebih landjut tang daun tersebut dan kemungkinan² meng- tornja dari Indonesia setjara besar²an.

Nama Latin dari daun „t e n d u” itu ialah „Diospyros Melnoxylon”, sedangkan nama Indonesiarja tiadak begitu diketahui. Bentuknja seperti daun djati jang paling muda atau seperti daun tembakau jang paling bawah.

Dalam hubungan ini penulis teringat akan sua- tu daun jang biasa dipergunakan untuk menggu- lung rokok oleh rakjat di Tapanuli Selatan, teru- tama orang tua², jaitu „Burung” Bio-bio” (daun bio²). Daun biobio itu berbentuk hati dan lebarnja seluas telapak tangan. Dan ini banjak sekali di daerah tersebut.

Walaupun bagaimana ahli² pertanian kita tentu akan dapat memberikan namanja jang pasti dalam bahasa kita. Disamping itu mereka tentu akan dapat pula memberikan kepastian apakah daun tendu itu jang Latinnja telah disebut tadi, memang banjak tumbuh di Indonesia.

Djika memang demikian halnja, maka dengan mengekspor daun tersebut, Indonesia tidak sadja akan mendapatkan devisa jang sangat diperlu- kan untuk pembangunan negara sekarang ini, tetapi djuga sekaligus menolong Saleem Ahmed dan ratusanribu orang sebangsanja dari kelesu- an jang sekarang menimpa mereka.

Antara.



Perusahaan
NIAGA NEGARA

P. N. PEMBANGUNAN NIAGA

Kantor Pusat: Hajam Wuruk No. 127 Djakarta

Telepon No. O.K: 21401 - 02 - 03

Melaksanakan Triprogram Pemerintah, dalam bidang perdagangan tehnik.

1. Impor/Distributor :

Bahan baku; bahan bangunan; Obat²an pharmasi; bahan² kimia tehnik; mesin² kimia tehnik; mesin² perkebunan/pertanian; mesin² industri ringan/berat; mesin² logam/kaju; grafika; alat² besar & Road rollers; mesin² diesel & tenaga penggerak utama arus lemah; arus kuat; mesin² sandang (pemintalan, peradjutan, pertenenan, Finishing & printing).

2. Export/interinsulair :

Karet, kopra, hasil² bumi dan barang²tehnik.

3. Pembangunan projek² :

Perentjana & pelaksana; melengkapi; reparasi & revisi, Projek² umum dan industri.

Tjabang² Utama : Djakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan.

Tjabang² biasa : Palembang, Padang, Banda Atjeh, Makasar dan Manado.

Sub. Tjabang : Tjirebon

Perwakilan di luar Negeri: Tokyo, Amsterdam dan Manila.

P.T. KARKAM⁹⁹

(P.T. KULIT ATJEH RAYA KAPTEN MARKAM)

KANTOR PUSAT : Djl. Pintubesar Selatan 97 atas Djakarta-Kota
Tilpon 23368 - 22644 - 21092
alamat kawat : KARKAM DJAKARTA

KANTOR TJABANG : M E D A N
P e k a n b a r u
D u m a i
R e n g a t
D j a m b i

KANTOR PERWAKILAN : T e m b i l a h a n
B e n g k a l i s
P a l e m b a n g
S i b o l g a

PPN P.T. KARKAM : A e r m o l e k (R i a u)
Perusahaan Remilling P.T. KARKAM : Kampung Lalang Sunggal (Sumatra Utara)

EXPORTIR : K A R E T
K O P R A
dan hasil perkebunan lainnja

IMPORTIR : BARANG² KEPERLUAN PEMBANGUNAN
KENDARAAN²
MESIN² DIESEL
untuk berbagai matjam keperluan
MESIN² KAPAL

BANK² KAMI IALAH : BANK INDONESIA
BANK NEGARA INDONESIA
BANK DAGANG NEGARA
BANK KOPERASI TANI & NELAJAN

** Dalam rangka „banting setir” untuk „berdikari” dibidang ekonomi dan pembangunan,
P.T. KARKAM melaksanakan kegiatan²-nja semata-mata untuk membantu Pemerintah..

** Sembojan kami ”MADJU TERUS PANTANG MUNDUR” UNTUK KEMENANGAN
REVOLUSI dan UNTUK TERTJAPAINJA MASJARAKAT SOSIALIS INDONESIA.

3

Indonesian

COPRA



EXPORTED
to all parts
of the
World



P
n. PANTJANIAGA

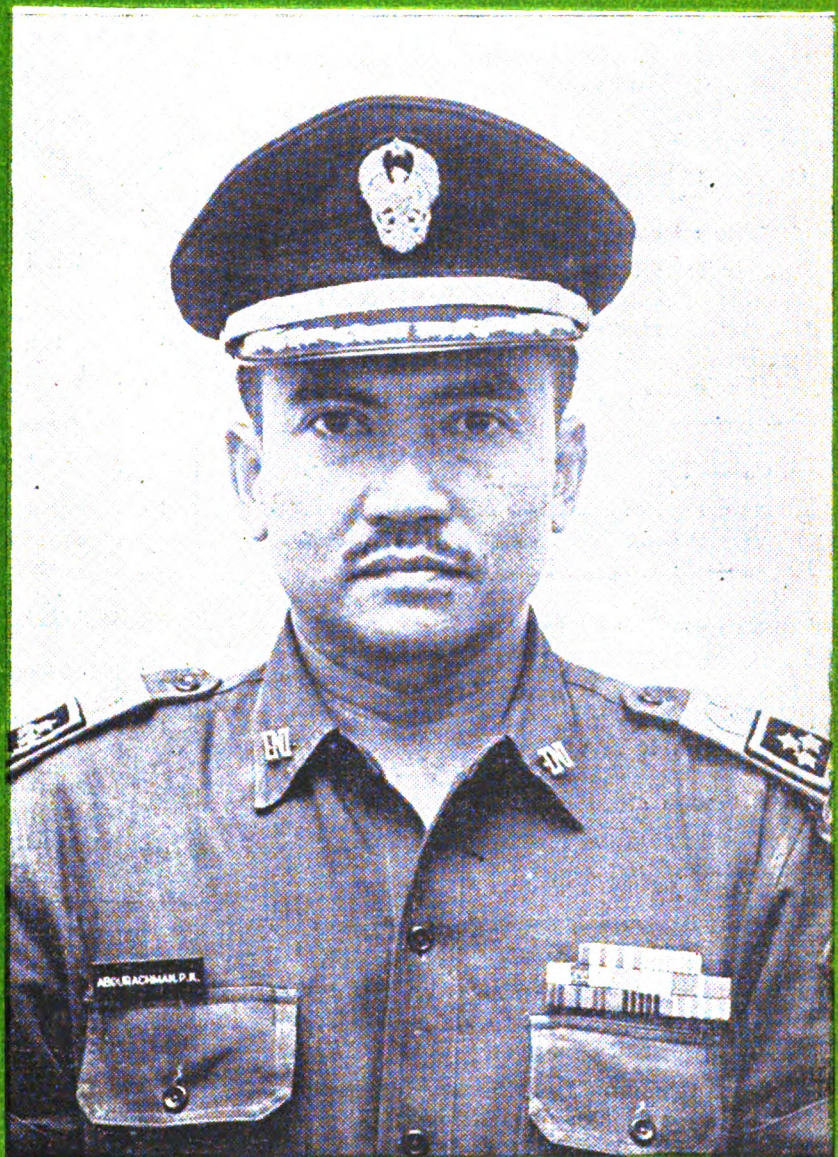


WARTA

Perdagangan

NOV 11 1966

AP
W299
P433
#18
22



22
1966
TAMBAH XVIII

MADJALAH

„WARTA PERDAGANGAN”

Terbit tiap 2 Minggu sekali

Diterbitkan oleh :

Departemen Perdagangan.

Pelindung :

J.M. Menteri Perdagangan.
Major Djenderal D. Ashari

Penasehat : Deputy Menteri Perdagangan
Kolonel Abdurachman Prawirakusumah.

Pemimpin Umum :

Ir. J.J. Pitoy M.A.

Dewan Redaksi :

Dr J. Panglaykim — Major Drs Sukadjat
— Ir J.J. Pitoy M.A. — Drs Darwis Umar
— Anwar B. Harahap — J. Lopian —
Ir Didi Abdurachman. —

Penanggung Djawab :

Anwar B. Harahap.

Pembantu Tetap :

Prof. Ir Teko Soemodiwirjo
Kol. Jusuf Ramli
R. Hertatijanto S.H.
Drs Waskito
Drs. Soekarno
Drs. Soesilo

Pembantu Khusus :

Kolonel Usman Ismail — Alamsjah S.B.P. —
R.H. Tuwaidan M.A. — Drs Sjaaf Mochtar
R. Isa — Drs. Sidik Moeljono.

Alamat Redaksi dan Tata Usaha :

Madjalah "WARTA PERDAGANGAN"
Direktorat Marketing dan Research
Djl. Tanah Abang Timur No. 87,
D J A K A R T A.

Pelaksana/Pertjetakan :

Kepala Pertjetakan P.N. Karya Tjotas
Burdj Reksodirdjo.

Pembayaran uang langganan dilakukan dimuka dengan :

1. Penjetoran atas Rekening Madjalah Warta Perdagangan Kode No. KB/WA/194, pada Bank Negara Indonesia Unit I Djl. Thamrin, Djakarta.
2. Dinas Giro dan Tjek Pos atau dengan pos wesel jang langsung dialamatkan kepada Tata Usaha Warta Perdagangan Direktorat Marketing dan Research.

DAFTAR ISI :

Halaman

1. Salah satu fungsi Koperasi adalah alat pen-
demokrasian Ekonomi Nasional
2. Ruang lingkup, wewenang dan tanggungja-
wab Menteri Perdagangan dan Koperasi.....
3. Perobahan nama Kemperdag menjadi Kem-
perdagkop.
4. Seruan Menperdagkop kepada Pedagang
Swasta
5. Keterangan Waperdam bidang Ekubang di-
muka Sidang DPR GR
6. Keterangan Waperdam bidang Sospol/Menlu
dimuka Sidang DPR GR
7. Keterangan Waperdam bidang Hankam a.i./
Men Pangad dimuka DPR GR
8. Keterangan Waperdam bidang Lembaga² Po-
litik dimuka Sidang DPR GR
9. Perobahan tarip Uang Retribusi dan Djami-
nan Perusahaan Perdagangan serta Biaja Ad-
ministrasi Gudang
10. Amanat Waperdam Hankam a.i. Men Pa-
ngad Let. Djen Soeharto berkenaan dengan
penundaan sidang MPR(S)
11. Pernyataan Angkatan Bersendjata Republik
Indonesia
12. Larangan pemakaian Devisa Pelengkap
untukimpor Kendaraan bermotor penumpang
13. Kegiatan BUKARET dibekukan
14. Variaberita Nusantara
15. Berita Singkat Perdag. Antar Negara
16. Commodities

Keterangan Gambar Kulit muka :
Deputy Menteri Perdagangan
Kol. Abdurachman Prawirakusumah

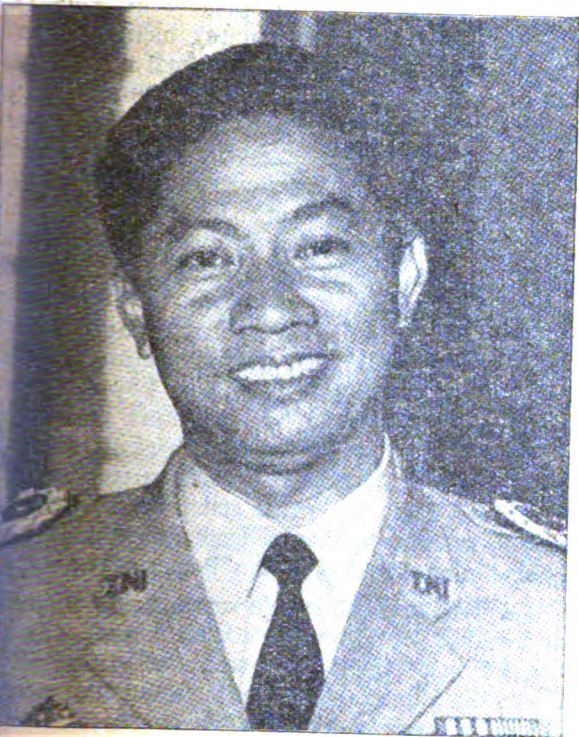
IZIN TERBIT :

Keputusan Menpen No. 00231/R/SK/D
SIT/'65 tgl. 3-9-1965, dan

Keputusan Peperda Djakarta Raya dan Seki
No. Kep. 037/P/X/65, No. Urt. 5 tgl. 21-10

SALAH SATU FUNGSI KOPERASI ADALAH ALAT PENDEMOKRASIAN EKONOMI NASIONAL

Amanat Menperdagkop pada rapat anggota G.K.B.I. tgl. 30 - 4 - 1966



Menteri Perdagangan dan Koperasi
Maj. Djen. D. Ashari

Yang terhormat Deputy Menteri Koperasi
Yang terhormat Deputy Menteri Perdagangan
Yang terhormat Deputy Menteri Perindustrian
dan tekstil.

Yang terhormat Djendral Rahardjodikromo Ketua
Majelis Periode KOKSI

Yang terhormat Pimpina dan anggota² GKBI yang sangat
kami muliakan.

Saudara² sekalian

Kami mengutjap sjujur kehadirat Tuhan JME,
pada rapat anggota GKBI yang dinanti-nantikan
akhirnja dapat diselenggarakan pada malam hari
harapan kita semua ialah supaja masalah² dalam
GKBI ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin
dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya
kepada para anggota, masjarakat dan negara. Saja
harap sekali supaja Saudara² menjadari soal
karena apa yang terdjadi dengan G.K.B.I. seka-
ini akan didjadikan ukuran bagi masjarakat,
supaja gerakan koperasi dalam mengikuti kebi-
sanaan Pemerintah yang baru ini, yang umurnja
baru satu bulan.

Bagaimana sebenarnya kebidaksanaan Pemerintah
yang ini mengenai kekoperasian? Didalam me-
lakukan kebidaksanaannja dalam bidang keko-
perasian, Pemerintah tetap berlandaskan pada filsafah

negara dan rakjat Indonesia ialah Pantjasila dan dalam bidang ekonomi pada pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 kita jang berbunji :

„Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”. Bagi siapa jang membuatja pendjelasan ayat ini akan mengetahui bahwa dengan perusahaan yang dianggap sesuai adalah koperasi.

Tentunja kita semua ingin tahu fungsi apa yang akan diberikan kepada koperasi. Kiranja saudara² akan sependapat dengan saja kalau Pemerintah memandang koperasi sebagai :

1. pembina insan masjarakat
2. wahana kemasjarakat Sosialis Indonesia
3. alat pendemokrasian ekonomi nasional.

Adalah tugas dan kewadajiban Pemerintah, chususnya Kementerian Perdagangan dan Koperasi untuk membina, membimbing dan mengawasi perkembangan koperasi, yang diarahkan kepada keadaan dimana koperasi dapat melaksanakan fungsi²nja tersebut dengan sebaik-baiknya.

Saudara-saudara sekalian,

Supaja koperasi dapat melaksanakan fungsi²nja, marilah kita teliti bersama apakah seharusnya yang merupakan dasar² atau azas² bekerdja koperasi? Kiranja pengertian² dibawah ini dapat kita gunakan sebagai pegangan :

1. Koperasi (tingkat primer) adalah kumpulan orang² dan bukan kumpulan modal, yang berarti bahwa koperasi harus benar² mengabdikan kepada perike-manusiaan dan bukan kepada kebendaan.
2. Anggota² koperasi hendaknya bekerdja-sama, bergotong-rojong berdasarkan persamaan dera-djat, hak dan kewadajiban yang berarti koperasi adalah seharusnya merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Karena dasar demokrasi ini maka harus didjamin benar² bahwa koperasi adalah milik para anggota sendiri dan pada dasarnya harus diatur serta diurus sesuai dengan keinginan para anggota yang berarti bahwa hak tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota.
3. Segala kegiatan koperasi harus didasarkan atas kesadaran para anggota, yang berarti bahwa dalam koperasi pada dasarnya tidak boleh dilakukan paksaan, antjaman, intimidasi dan tjampur tangan dari pihak² lain yang tidak ada sangkut pautnja dengan soal² intern koperasi.
4. Tujuan koperasi harus benar² merupakan kepentingan bersama dari para anggotanja dan tujuan itu ditjapai berdasarkan karya dan djasa yang disumbangkan para anggota masing². Ikut sertanja

anggota menurut besar ketijlnja karya dan djasanja harus tertjermin pula dalam hal pembagian pendapatan dalam koperasi.

Dengan sangat sedih kita bersama telah menjaksikan bahwa dalam tahun² belakangan ini azas² dan dasar bekerdja koperasi ini telah diperkosa bukan sadja oleh orang² jang menentang koperasi, tetapi djustru oleh mereka jang karena kedudukannja seharusnya melindungi azas² ini. Adalah tidak mengherankan bahwa pada waktu ini kita semua menerima warisan reruntuhan dari bangunan koperasi jang fundament-nja, dasarnya telah mengalami kerusakan jang sangat hebat. Adalah wadjar bahwa suatu bangunan runtuh karena hantjur fundament-nja.

Nasib ini telah dialami oleh sebagian terbesar koperasi dan hanja sedikit jang masih dapat bertahan untuk melandjutkan hidupnja, akan tetapi jang djelas ialah apa jang masih ada sadja sudah tidak dapat mendjalankan fungsijnja sebagaimana mestinja.

Saudara-saudara sekalian,

Sudah mendjadi tekad dari Pemerintah jang sekarang ini untuk menegakkan Koperasi pada dasarnya jang wadjar hingga koperasi dapat melakukan fungsi²nja seperti diatas. Dan rapat² anggota ulangan pada primer G.K.B.I. serta rapat anggota G.K.B.I. pada malam ini pada hakekatnja adalah langkah pertama dari tekad Pemerintah tersebut. Tentu sadja lanjak rintangan dan kesulitan jang akan dialami, apalagi kalau diingat bahwa proses pengrusakan dasar-dasar koperasi ini telah berdjalan sekian lamanja. Sudah djelas bahwa musuh² koperasi, orang² jang tidak suka pada koperasi dan azas jang wadjar dari koperasi, mereka jang punja vested interest dan sebagainya akan tidak senang melihat koperasi berdiri diatas dasar²nja jang wadjar. Bagi Pemerintah dan saja yakin djuga saudara² tidak gentar dan tidak ketjil hati menghadapi rintangan dan halangan sematjam itu. Tanpa ketetapan hati dan kejakinan akan benar-nja prinsip² berkoperasi jang kita pegang, kita akan gagal menempatkan kembali koperasi pada azas-azasnja.

Saudara-saudara sekalian,

Akan djelas bagi siapapun djuga bahwa Pemerintah akan tidak berhasil mendjalankan tugasnja tanpa ikut sertanja gerakan koperasi sendiri. Apalagi kalau diingat bahwa nasib koperasi pada dasarnya harus ditangan gerakan koperasi sendiri. Koperasi mempunjai suatu sifat jang disebut swadaja atau berdikari. Dengan mengingat akan swadaja koperasi ini, maka Pemerintah harus memberikan kebebasan jang tjukup bagi koperasi untuk memperkembang ideologi dan aspirasinja sesuai dengan azas-azasnja. Gerakan Koperasi harus memiliki tjukup kebebasan guna mengatur kehidupan dan penghidupannja sendiri. Tetapi Pemerintah tetap berpendirian, bahwa kebebasan jang dimiliki oleh koperasi ini kemudian djangan berkembang mendjadi anarchisme, tempat berkembangnja kepentingan partai² politik, kepentingan golongan dan perorangan serta vested interest.

Pemberian kebebasan bagi koperasi untuk mengdiri sendiri pada dasarnya didorong oleh rasa ketjajaan Pemerintah terhadap kemampuan rakyat untuk dapat mengatasi masalah²nja sendiri kkesempatan untuk itu diberikan. Adalah suatu keliruan prinsipiil kalau pemberian keprtjaja kepada kemampuan rakjat untuk mengatur kehidupan sendiri itu ditafsirkan sebagai menghidupkembali demokrasi liberal. Djustru Pemerintah jang bahwa dengan menaruh keprtjajaan jang bulat pada kemampuan dan kesanggupan rakjat ini, maka rakjat dan dalam hal ini koperasi, akan dapat melaksanakan fungsijnja dalam soal² social-participa social support dan social control setjara tepat. Dalam rangka ini, maka demokrasi terpimpin dimana undemokrasi dan unsur terpimpin terdapat kesibangan jang harmonis harus benar² dapat menghidup dan membina kehidupan dan pergaulan jang serukun dan penuh pengertian dalam koperasi. Dalam memberikan kebebasan bagi koperasi untuk mengatur diri sendiri, maka Pemerintah akan selalu sikap „Tut Wuri Handayani” dalam pengertian bahwa Pemerintah bilamana perlu setiap saat akan tangan guna memberikan pengamanan terhadap pelaksanaan koperasi dan kebdjaksanaan Pemerintah.

Saja serukan disini supaja semua fihak mempunyai pengertian bahwa koperasi adalah benar² dan harus benar² dibina sebagai organisasi ekonomi rakjat demokratis dimana hak² tertinggi untuk mengatur kehidupan koperasi adalah ditangan mereka sendiri. Koperasi bukan milik partai ataupun golongan djanganlah kepentingan partai dan golongan disamakan melalui koperasi, karena hal ini hanja akan menimbulkan kerusakan koperasi sadja seperti telah kita alami tahun² belakangan ini. Perlu tegaskan pula disini bahwa Pemerintah tidak dibiarkan kalau koperasi akan dipolitikan segala tindakan akan diambil untuk mengamankan

Niat Pemerintah untuk memulihkan hak angguna mengatur kehidupan koperasi oleh mereka diri ternyata mendapat sambutan jang hangat seluruh gerakan koperasi di Indonesia termasuk anggota koperasi batik. Kejakinan Pemerintah bahwa kebebasan jang dipulihkan tersebut tentu akan digunakan dengan bidjaksana ternyata dibenarkan kenjataan² jang telah terdjadi dalam rapat² anggota primer G.K.B.I. jang baru² ini diselenggarakan seluruh Djawa dalam rangka persiapan rapat har

Dari laporan² resmi jang saja terima, maka perhatian pengurus terdjadi tanpa ada tekanan dari manapun dan dilakukan setjara bebas sesuai dengan kehendak para anggota sendiri. Djuga dalam perkembangan fikiran dengan induk² Koperasi jang ada Djakarta baru² ini telah memberikan kejakinan pada saja bahwa kebidjaksanaan Pemerintah sekarang adalah benar mengingat sambutan tanggapan jang begitu enthusias dari wakil² gerakan koperasi ini.

Saudara-saudara sekalian,

Adalah tugas dan kewadajiban Pemerintah u

swadaja supaya azas² dan dasar bekerdja koperasi telah saja bentangkan diatas dapat berkembang dengan sebaik-baiknya. Tetapi disamping tindakan² yang sifatnja mendorong diperkembangnja azas² dan dasar koperasi, Pemerintah-pun mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengambil langkah² yang perlu untuk mengamankannja terhadap tiap penyalahgunaan, penjelewengan dan perkosaan terhadap azas² dan dasar koperasi. Sudah djelas bahwa pengamanan terhadap azas² koperasi sadja belum menjelesaikan persoalan kekoperasian di Indonesia ini. Dalam rangka pembentukan Sosialisme Indonesia dan pelaksanaan ekonomi terpimpin, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan fasilitas² dan perlindungan yang diperlukan koperasi. Hanya perlu digegaskan disini bahwa fasilitas dan perlindungan harus dapat mengamankan azas² koperasi, membentangkan dasar swadaja dan djangan sampai berantakan sebagai pemandjaan. Disamping ini semua harus djelas kiranja bahwa Pemerintah-pun akan perlu membina, membimbing dan mengawasi supaya kegiatan koperasi selalu terarah sesuai dengan fungsi-fungsinya.

Saudara-saudara sekalian,

Kalau dasar² kebidjaksanaan kekoperasian telah djelaskan diatas, tentunja orang bertanja apa yang akan merupakan program kerdja Kementerian Perdagangan dan Koperasi/Departemen Koperasi dalam waktu² dekat mendatang ini. Kiranja dapat disampaikan garis² besarnya sebagai berikut :

Meskipun Koperasi adalah sebuah badan ekonomi, akan tetapi karena dasar² bekerdjanja, Koperasi memiliki norma² moralitas yang tidak hanya mengambil peranan yang sangat besar, malahan sangat menentukan. Boleh dipastikan bahwa koperasi akan mengalami kegagalan, bila mana koperasi meninggalkan norma² moralitas yang telah ditetapkan. Berhubung dengan itu maka peranan manusia dalam bidang kekoperasian adalah menentukan tidak hanya dalam gerakan koperasi, tetapi djuga dalam Pemerintahan yang bersangkutan, karena kewibawaan Pemerintahlah mempunyai sangat paut dengan norma² tersebut. Situasi dalam bidang koperasi di Indonesia dalam tahun² achir² ini telah membenarkan pendapat diatas.

Karena itu dalam rangka memperbaiki/membina kembali kehidupan dan penghidupan koperasi, maka segera harus diadakan retooling personalia dalam bidang Pemerintahan yang bersangkutan terlebih dahulu dan selandjutnja dalam koperasi sendiri, dimana persjaraan moral harus merupakan salah satu norma penetapannja.

Dalam bentuk konkritnja, maka retooling personalia yang berlaku bagi bidang Pemerintahan dan djuga Koperasi, ditudjukan kepada sasaran² sebagai berikut :

a. orang² yang terlibat dalam G-30-S beserta penjakong dan simpatisan²nja.

- b. orang² yang tidak memenuhi sjarat² moralitas dan kepemimpinan menurut ukuran² koperasi.
- c. orang² yang tidak tjakap mendjalankan tugas pekerdjaannya.

Sebagai penggantinya, maka perlu diambilkan orang² yang pada dasarnya memenuhi sjarat² minimum sebagai berikut :

- a. lebih dalam ideologi dari pada yang dipimpin (dengan sendirinja ideologi Pantjasila dan Koperasi);
- b. lebih dalam achlak dari pada yang dipimpin;
- c. lebih dalam ketrampilan pekerdjaan (skill) daripada yang dipimpin.

3. Sebagai kelanjutan dari retooling personalia, maka segera harus diadakan retooling organisasi/management. Organisasi bidang Pemerintahan yang melajani koperasi harus direorganisir sesuai dengan kebutuhan dan harus dapat bekerdja setjara efficient dan efektif.

Meskipun sebagai tudjuan reorganisasi itu ialah penjederhanaan, akan tetapi penjederhanaan ini tidak boleh melemahkan arti ideologis dari koperasi seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan kedudukan koperasi sebagai wahana ke Sosialisme Indonesia.

Kedudukan ideologis dari koperasi ini harus tertjerminkan dalam struktur organisasi Pemerintahan yang bersangkutan dan harus ikut menentukan kebidjaksanaan ekonomi, keuangan dan sosial yang diambil oleh Pemerintah. Bukanlah suatu kebetulan, bahwa unsur perdagangan dan koperasi disatukan dalam satu wewenang dari Kementerian Perdagangan dan Koperasi. Akan tetapi Pemerintah memang sengadja berbuat demikian karena untuk menghadapi serta mengatasi segala persoalan ekonomi pada waktu ini perlu dikerahkan segala funds dan forces dimana perdagangan dan koperasi setjara saling djalin-mendjalin harus memeloporinja.

4. Bidang² yang memerlukan penjempurnaan ialah :
 - a. pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap organisasi koperasi.
 - b. pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan ekonomi koperasi.
 - c. pendidikan dan penerangan koperasi.
 - d. yang menjangkut pembinaan dan pengembangan ideologi koperasi.
5. Dalam rangka pembinaan kembali dan stabilisasi koperasi pada waktu ini, maka pertama-tama yang harus dilakukan ialah menegakkan kembali azas² dan dasar koperasi dan djaminan bagi gerakan koperasi bahwa azas dan dasar² tersebut akan selalu dipelihara dan diperkembang. Hal ini antara lain harus tertjerminkan dalam bidang peraturan perundangan.
6. Membina kembali dan menstabilisir koperasi dengan tjara² sebagai berikut :

- a. mengadakan pemilihan pengurus dan badan pemeriksa setjara demokratis dengan berpegang pada azas bahwa hak tertinggi dalam koperasi adalah ditangan rapat anggota. Rapat anggota untuk pemilihan ini diadakan pada semua tingkat koperasi..
- b. menertibkan struktur organisasi dari semua djenis dan tingkat koperasi.
- c. menertibkan dan menjehatkan management koperasi disemua djenis dan tingkat supaja koperasi dapat bekerdja setjara efficient dan efektif.
- d. mengatur dan merasionilkan pola dan rentjana kerdja serta pembiajaan dalam dan antar koperasi dengan tidak melupakan usaha memperkembang azas swadaja/berdikari koperasi.
- e. mengatur dan merasionilkan pendjenisan koperasi sesuai dengan kebutuhan dimana spesialisasi akan mengambil peranan penting.

Untuk mendjamin berhasilnja pembinaan kembali gerakan koperasi dari kerusakan sekarang ini, maka kepada koperasi perlu diberikan :

- a. fasilitas² jang tjukup dari Pemerintah.
 - b. kredit jang tjukup.
 - c. perlindungan hukum jang efektif terhadap usaha² jang merusak dari dalam maupun dari luar.
 - d. bimbingan dan pengawasan jang ahli, efficient, luwes tetapi efektif dan tidak mengadakan tjampur tangan jang merugikan kedalam koperasi.
7. Dalam rangka ekonomi perdjuaan jang sedang kita lakukan dimana prioritas diberikan kepada pangan, ekspor, prasarana dan sandang maka koperasi menurut bidangnja harus ambil bagian sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannja masing². Dalam hubungan ini peranan koperasi terutama akan dikerahkan dalam kegiatan² :
- a. pengumpulan dan distribusi bahan² pangan dan bahan pokok kebutuhan sehari-hari.
 - b. pengumpulan, pengolahan, distribusi (dalam negeri dan ekspor) hasil² pertanian rakjat seperti karet, kopra dan lain²nja, serta hasil industri seperti batik, keradjinan tangan dan sebagainja.
 - c. pengadaan (termasuk impor) bahan² baku dan bahan pokok lain untuk keperluan produksi dari koperasi.
 - d. produksi dan distribusi sandang dan barang² kebutuhan pokok lain.

Segala program kerdja diatas hanja akan berhasil bilamana pelaksanaannja dilandas pada suatu **prasarana mental** jang kemuk harus melahirkan suatu **doktrin perkoperasianasional** jang dapat merupakan landasan untuk mengadakan banting stir mental hingga kope dapat diarahkan dengan efektif kepada fungsi².

Saudara-saudara sekalian,

Karena masalah koperasi ini mempunjai aspek jang banjak jang meliputi soal² politik, soekonomi dan sebagainja, maka pada dasarnya timungkin kalau bimbingan efektif dapat diberikan hanja oleh Kementerian Perdagangan dan Koperasi Departemen Koperasi sadja. Koordinasi antar instansi² jang ada hubungan dengan kehidupan koperasi adalah suatu keharusan. Soal ini adalah lama jang dalam prakteknja paling sulit untuk dilaksanakan.

Dalam rangka penegakan kembali azas kekerasian ini, maka dengan sendirinja Pemerintah memberi kesempatan kepada gerakan koperasi untuk mengajukan usul² dan saran² mengenai sel masalah kekerasian. Pada waktu ini telah diadakan tuntutan dari gerakan koperasi untuk diadakan penindjauan kembali terhadap Undang-Undang Kop. No. 14 tahun 1965; fungsi dan susunan K.O.K.S.I. jang sekarang ini; perwakilan gerakan koperasi dalam lembaga² negara dan keputusan² Munaskop II tahun 1965 jang Terhadap tuntutan² ini Pemerintah memberi luasaan kepada gerakan untuk memperbintjanganja diantara mereka jang hasilnja dapat diadjudikasi kepada Pemerintah untuk dimusjawarahkan bersama.

Saudara-saudara sekalian,

Sampailah saja pada achir pemitjaraan saja dengan sangat minta kepada rapat ini untuk membantu Pemerintah dalam mengadakan rehabilitasi dan stabilisasi kehidupan dan penghidupan kita masuk kekerasian ini. Harapan saja rapat ini dapat mentjerminkan kerukunan, kegotong-rojongan persatuan koperasi untuk mentjapai kesedjahteraan anggota, masjarakat dan negara. Djanganlah pendapat jang ada ditumbuhkan mendjadi pertentangan jang tadjam dan selesaikan segala persoalan benar² berdasarkan semangat dan filsafah koperasi.

Sekian dan terima-kasih.

RUANG LINGKUP, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Dengan mendahului Keputusan Presiden, oleh M. WAPERDAM bidang EKUBANG Sri Sultan Mangkubuwono IX dengan Keputusan tanggal 4 April 1966 No. Aa/E/57/1966 telah ditetapkan Ruang Lingkup, Wewenang dan Tanggungjawab Menteri Perdagangan dan Koperasi.

Keputusan ini diambil dengan pertimbangan, bahwa untuk pelaksanaan program Pemerintah dalam bidang ekonomi dan keuangan pada umumnya yang menudju kearah BERDIKARI dan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk memperluas dan meningkatkan produksi didalam negeri serta ekspor; ruang lingkup wewenang dan tanggungjawab Menteri Perdagangan dan Koperasi harus disesuaikan dengan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh WAPERDAM EKUBANG, dan harus terdjalin dengan ruang lingkup dan tanggungjawab Menteri² lain yang merupakan pembina produksi dibidang masing².

Selanjutnja dalam Keputusan tersebut ditetapkan, bahwa Menteri Perdagangan dan Koperasi adalah pembina, pembimbing dan pengawas daripada seluruh bidang perdagangan dan koperasi.

Bidang perdagangan mentjakup perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri.

Koperasi mentjakup bidang produksi, bidang tagalaga, bidang konsumsi dan distribusi, bidang kredit dan permodalan serta djasa².

Pembinaan bidang perdagangan didasarkan atas prinsip² sbb.:

Perdagangan dalam dan luar negeri dimanfaatkan kepada kepentingan nasional terutama untuk kesedjahteraan rakyat.

Perdagangan berkisar terutama pada bidang² pengadaan dan distribusi, penjaluran, pengumpulan, ekspor serta impor.

Perdagangan dilakukan dengan dajaguna dan hasil guna (efektif & efisien) yang maksimal. Pembinaan bidang koperasi didasarkan atas prinsip² sbb.:

Turut membentuk manusia Indonesia menjadi insan masjarakat.

Sebagai wahana yang mengantar tahap revolusi nasional-demokratis ke tahap revolusi sosialisme Indonesia.

Mendemokratisasikan Ekonomi Nasional.

Menteri Perdagangan dan Koperasi sebagai pemertanggungjawab dari:

1. seluruh bidang perdagangan menetapkan kebijaksanaan umum dalam bidang pembinaan perusahaan² perdagangan nasional, baik perusahaan² Pemerintah tingkat Pusat dan Daerah maupun perusahaan² swasta didalam atau diluar negeri.

Impor dan Ekspor

2. Berdasarkan ketentuan² umum dan pedoman² yang dikeluarkan oleh Presidium Kabinet Dwikora, Menteri Perdagangan dan Koperasi dengan

memperhatikan pertimbangan² atau saran² Menteri² lainnja yang bersangkutan dengan hubungan ekonomi luar negeri:

a. Mengatur pemasaran barang² ekspor hasil Indonesia di luar negeri yang didasarkan atas kebijaksanaan untuk memperkuat posisi dan peranan Indonesia dalam pasaran internasional.

b. Mengadakan perdjandjian² dagang dengan negara² lain atas dasar pertimbangan² komersial, berdasarkan kerdjasama dan hubungan ekonomi luar negeri yang telah digariskan oleh Menteri Luar Negeri.

c. Menetapkan prosedur² impor dan ekspor.

Dengan memperhatikan pertimbangan² atau saran² Menteri² lainnja yang berwenang dalam hubungan ekonomi luar negeri, Menteri Perdagangan dan Koperasi menetapkan kebijaksanaan umum tentang pengadaan melalui impor daripada barang atau bahan yang dibutuhkan berdasarkan:

a. target² produksi serta konsumsi nasional yang ditetapkan oleh Menteri² yang bersangkutan sebagai pembina tunggal produksi dibidang masing², dan

b. target² impor yang diadjukan oleh Menteri² yang bersangkutan berdasarkan pola konsumsi dibidang masing².

Atas dasar target² ekspor yang ditetapkan oleh Menteri² yang bersangkutan sebagai pembina tunggal produksi di bidang masing², maka Menteri Perdagangan dan Koperasi menetapkan kebijaksanaan umum tentang pelaksanaan ekspor bahan² produksi dan bahan² djadi hasil Indonesia ke luar negeri.

Pengumpulan, penjaluran dan distribusi

Menteri Perdagangan dan Koperasi menetapkan peraturan² umum tentang prosedur pelaksanaan mengenai:

a. pengumpulan bahan² produksi dan bahan² djadi yang akan diekspor ke luarnegeri;

b. penjaluran bahan² baku, bahan² penolong, spareparts dan alat-peralatan yang berasal dari impor luar negeri;

c. distribusi barang² djadi yang diproduksi didalam negeri maupun yang diimpor dari luar negeri.

Prosedur pelaksanaan penjaluran dan distribusi tersebut diatas hanja ditetapkan sepanjang mengenai barang² yang diawasi.

H a r g a

Berdasarkan ketentuan² umum dan pedoman² yang dikeluarkan oleh Presidium Kabinet DWIKORA, maka Menteri Perdagangan dan Koperasi menetapkan ketentuan² tentang harga barang² yang diawasi, baik yang diproduksi didalam negeri maupun yang diimpor dari luar negeri, dengan memperhatikan usul² Menteri² yang membina produksi di bidang masing², termasuk barang² sedjenis untuk melengkapi target² produksi Kementerian atau Departemen dibidang masing².

Bersambung kehal. 6.

Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora R.I. No. 1. Tahun 1966 :

**PENGGANTIAN NAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN
MENDJADI KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI
PRESIDIUM KABINET DWIKORA R.I.**

M e n i m b a n g :

1. bahwa Kementerian Perdagangan mentjakup baik bidang perdagangan maupun bidang koperasi;
2. bahwa berhubung dengan itu perlu mengerti nama Kementerian Perdagangan dan merubahnja mendjadi Kementerian Perdagangan dan Koperasi.

M e n g i n g a t

1. Pasal 4 ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945;
2. KEPPRES No. 63 Tahun 1966;
3. KEPPRES No. 64 Tahun 1966;

M e m p e r h a t i k a n :

Saran - saran Menteri Perdagangan, .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA :

Mendahului Keputusan P.J.M. Presiden mengganti nama Kementerian Perdagangan dan merubahnja mendjadi Kementerian Perdagangan dan Koperasi dengan singkatan KEMPERDAGKOP.

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 6 April 1966

**A. N. PRESIDUM KABINET DWIKORA R. I.
WAKIL PERDANA MENTERI BIDANG
EKONOMI - KEUANGAN - PEMBANGUNAN**

t. t. d.

(Sri Sultan Hamengkubuwono IX)

Ruanglingkup, wewenang

Sebagai penutup Keputusan Presidium Kabinet Dwikora R.I. No. Aa/E/57/1966 tersebut ditetapkan, bahwa semua kegiatan² dalam bidang perdagangan dalam dan luar negeri dan koperasi dan semua aparatur Pemerintah serta badan² usaha Negara, jang ditugaskan dibidang pembinaan perdagangan dalam dan luar negeri dan koperasi, baik jang berada di Pusat, di Daerah Tingkat I (Propinsi), maupun jang berada diluar negeri, setjara taktis, teknis dan fungsionil diintegrasikan kedalam wewenang dan tugas Menteri Perdagangan dan Koperasi.

Semua ketentuan² dalam keputusan ini berlaku selama tidak ditentukan lain oleh Presidium Kabinet DWIKORA RI.

Peraturan² pelaksanaan keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan dan Kope-

rasi dengan mengingat pedoman² dan ketetapan dari Presidium Kabinet Dwikora RI. **

**ARIFIN HARAHAP S.H. DEPUTY MENTERI
KEUANGAN**

Dengan Keputusan Presiden RI No. 90 Tahun 1966, Arifin Harahap S.H. Anggota Staf Waper Ekubang telah diangkat mendjadi Deputy Menteri Kepala Departemen Keuangan disamping djaba nja jang sekarang.

Pengangkatan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkanja keputusan tersebut dan berdjaja s sampai tanggal 27 Maret 1966.

Seperti diketahui, pimpinan Departemen Keuangan sebelumnya dirangkap oleh Menteri Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI No. 64 Tahun 1966. **



MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI

SERUAN J. M. MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI KEPADA PARA PEDAGANG SWASTA

Dalam Statement J.M. WAPERDAM bidang EKUBANG pada tanggal 12 April 1966 dinjatakan bahwa sektor Swasta diberi kesempatan mengembangkan diri dan membantu usaha rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi menurut petundjuk² Pemerintah. Bahkan dinjatakan pula dalam statement tersebut, bahwa Pemerintah akan meninggalkan sikap seolah² mereka itu musuh Negara dan Rakjat.

Berhubung belakangan ini ada gedjala² jang sifatnja kurang membantu usaha² Pemerintah dalam bidang rahabilitasi dan stabilisasi ekonomi, dengan ini ditandaskan, bahwa Pemerintah tidak akan ragu² pula untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pedagang Swasta jang dengan sengadja melakukan tindakan² pengatjauan dibidang ekonomi, chususnja sektor perdagangan. Terhadap pengatjauan² tersebut pengusaha jang bersangkutan dapat ditjabut surat izin usahanja dan konfiskasi terhadap barang² daganganja. Chususnja untuk daerah Djakarta - Raya telah diadakan kerdja - sama dengan PEPELRADA - DJAYA kearah langkah² tersebut.

Dalam keadaan dimana Pemerintah bersama² dengan Rakjat jang progresif - revolusioner Pantjasila berusaha sekeras²nja untuk menanggulangi kesulitan² ekonomi dewasa ini, diserukan agar supaja fihak swasta chususnja para pengusaha swasta Asing (R.R.T. India, Pakistan dsb). jang berdagang di Indonesia dapat menginsjafi untuk melihat bidang perdagangan bukan hanja dari motif pengerukan keuntungan semata² dengan meninggalkan kepentingan masjarakat.

Achirnja kepada para pimpinan OPS - Impor, OPS - Pengetjer, OPS - Antar Pulau dan G.P.E.I.S. diharapkan dengan sangat agar memperhatikan seruan ini serta memberikan bimbingan serta pengawasan terhadap para anggotanja sehingga benar² mentaati seruan ini.

Djakarta, 5 Mei 1966

MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI

t. t. d.

D. A S H A R I
(Maj. Djen. T.N.I)

DARI KETERANGAN PEMERINTAH DIDEPAN DPR-GR. MENGENAI :

BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Disampaikan Waperdam Ekubang pada tgl. 6 - 5 - 1966

Jang Mulia Pimpinan dan Jang terhormat para anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

Dalam pertemuan jang pertama antara Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong dan kami sebagai Wakil Perdana Menteri bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan ini pertama-tama kami mengutjapkan banjak terima kasih atas kesempatan jang diberikan kepada kami untuk memberi keterangan tentang keadaan ekonomi dan keuangan Negara serta tentang retjana tindakan² jang dianggap perlu oleh Pemerintah didalam bidang itu.

Kami memberikan statement itu diluar sidang DPR-GR oleh karena pada waktu itu DPR-GR sedang reses, sedang statement itu sudah segera diperlukan untuk memberi landasan kerdja kepada semua Menteri dan Deputy Menteri beserta Pedjabat² Pemerintah lainnja didalam bidang jang dipertanggung djawabkan kepada kami.

Tentang garis² kebidjaksanaan Pemerintah dalam bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan kami telah memberikan statement dua kali, jaitu jang pertama kali pada tanggal 4 dan jang kedua kali pada tanggal 12 April jang baru lampau.

Statement jang pertama itu kami tudjukan khusus kepada luar negeri untuk menerangkan keadaan ekonomi jang sebenarnja di Indonesia dan keinginan kita untuk bekerdja sama dengan negara² lain dengan tujuan jang saling menguntungkan dan atas dasar hormat-menghormati dan pertjaja-mempertjajai. Statement kami tanggal 4 April itu sangat erat hubungannja dengan statement rekan kami Wakil Perdana Menteri bidang Sosial merangkap Menteri Luar Negeri jang diberikan pada hari itu djuga.

Adapun statement kami pada tanggal 12 April 1966 ditudjukan kepada rakjat Indonesia setjara langsung dan dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekedar tentang keadaan ekonomi Negara kita pada dewasa ini jang sangat serius keadaannya, tetapi masih ada tanda² harapan jang baik. Lain dari pada itu didalam statement itu kami djelaskan kebidjaksanaan Pemerintah untuk menanggulangi masalah² ekonomi dan keuangan jang kita hadapi. Kami mengira bahwa pada rapat ini kami tidak perlu mengulangi statement tersebut oleh karena statement itu akan disampaikan kepada pimpinan dan para anggauta jang terhormat dari Dewan Perwakilan Rakjat.

Namun kami kira ada baiknja apabila disini kami dengan singkat sadja memberikan isi pokok dari statement itu jang sekarang ini mendjadi pedoman bagi semua Menteri dan Deputy Menteri jang mempunyai hubungan dengan tugas didalam bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan.



Sri Sultan Hamengkubuwono IX

Tujuan dari pada kebidjaksanaan Pemerintah seperti jang dimuat dalam statement tanggal April 1966 adalah rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi umum di Negara kita. Jang dimaksudkan dengan rehabilitasi ekonomi adalah usaha untuk menertibkan kembali djalannja usaha ekonomi dan keuangan serta memulihkan kembali aparatur ekonomi dan keuangan Negara pada posisi dan keajaiban jang sewadjaranja. Adapun usaha stabilisasi dimaksudkan untuk menghambat dan pada akhirnya menghentikan djalannja inflasi moneter sehingga harga² umum dapat mendjadi stabil dalam djang waktu jang tjukup lama.

Mengingat keadaan ekonomi dan politik sosial di Indonesia jang serba berubah dengan tjepatnja maka kami menganggap dewasa ini belakwaktunja untuk mengadakan rentjana pekerdjadjangka pandjang, akan tetapi kami membatndiri pada rentjana kerdja djangka pendek tan memberikan djandji kepada rakjat tentang hal apa jang pasti akan tertjapai dengan rentjana kerdja itu.

Berdasarkan atas keadaan ekonomi jang serba berubah dan inflasi moneter jang melanda rakjat umumnja maka jang didjadikan thema dari statement tersebut adalah "austerity program" atau program-kesejahteraan, jang perlu didjalankan baik oleh rakjat maupun oleh Pemerintah sendiri didalam kehidupan dan didalam kehidupan sehari-hari.

Unsur² pokok didalam "austerity program" itu terutama terletak didalam bidang mental kita semua, jaitu kita memerlukan perubahan didalam cara berfikir, tjara bersikap dan tjara bertindak sehingga dapat menguntungkan bagi usaha rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi. Kalau didalam waktu yang baru lampau setiap tindakan pemerintah atau para pemimpin rakjat dinilai baik dan buruknja dengan ukuran ideologi dan politik, maka sekarang setiap tindakan itu hendaknja dinilai djuga dengan ukuran ekonomi.

Unsur kedua adalah bersifat struktural dan berupa usaha untuk menjederhanakan bentuk dan susunan aparatur ekonomi Negara, lagi pula menjederhanakan prosedur administratif yang harus ditempuh didalam bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan.

Meskipun pimpinan dan para anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong yang terhormat telah mengalami dan mengetahui sendiri-sendiri keadaan ekonomi kita pada dewasa ini, namun disini kami ingin memberikan beberapa angka dari keterangan tentang hal itu, sekedar untuk memuktikan betapa besar perlunja "austerity program" dari Pemerintah yang ditempuh pada waktu ini.

Inflasi moneter yang mempunyai pengaruh yang buruk pada kehidupan ekonomi rakjat digambarkan dengan adanya uang beredar di Negara kita. Jumlah uang yang beredar itu didalam angka² bulat adalah seperti berikut:

Achir tahun 1962

Rp. 136 miljard.

Achir tahun 1963

Rp. 265 miljard, bertambah 98%.

Achir tahun 1964

Rp. 703 miljard, bertambah 162%.

Achir tahun 1965

Rp. 2.982 miljard, bertambah 309%.

Achir Maret 1966

Rp. 5.031 miljard, bertambah 68% dalam jangka waktu hanya tiga bulan.

Sebab yang utama dari bertambahnja uang yang beredar setiap tahun itu adalah defisit Anggaran Belanja Negara, defisit mana berdjumlah dalam tahun²: 1963 Rp. 139 miljard,
1964 Rp. 335 miljard,
1965 Rp. 1.527 miljard.

Defisit² itu setiap tahun ditutup dengan Uang Bank Negara Indonesia yang berarti dengan mencetak uang baru.

Hal tersebut menjebabkan berkurangnya kepercayaan terhadap mata uang rupiah, sehingga menimbulkan ketjenderungan untuk berspekulasi dalam perdagangan dimana orang dapat memperoleh keuntungan uang yang besar daripada berusaha dalam bidang produksi. Peralihan usaha dari bidang produksi kebidang perdagangan ini mengakibatkan perbedaan yang merugikan dalam jumlah barang dan djumlah barang² yang beredar, hal mana mengakibatkan seterusnya kenaikan harga² umum.

Kenaikan harga² itu demikian tjepatnja sehingga mengatjaukan banjak rentjana² usaha ekonomi dan rentjana² pembangunan, bahkan Pemerintah sendiri tidak dapat bekerdja dengan teratur menurut Anggaran Belandja yang seharusnya ditentukan setiap tahun. Selain daripada menghambat dan menjulitkan djalannja pemerintahan maka inflasi yang mengganas itu mematjetkan banjak projek² pembangunan, baik pembangunan swasta maupun pembangunan oleh Negara.

Djalannja pemerintahan itu bertambah lambat karena berdjangkitnja perasaan lesu pada para pegawai Negeri yang gadjinja setiap bulan tidak tjukup untuk membiyai hidupnja selama satu minggu, meskipun sudah dinaikkan lima kali berhubungan dengan penggantian uang rupiah lama dengan rupiah baru. Dalam keadaan yang demikian itu sekarang sudah kami dengar suara² apakah belum waktunja untuk menaikkan lagi gadji pegawai negeri itu.

Tentang masalah ini kami berpendapat tidak manfaatnja untuk menaikkan gadji uang buat para pegawai negeri selama inflasi masih terus mengganas. Usaha terbaik untuk menolong para pegawai negeri adalah dengan mempertjepat usaha rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi disamping mengusahakan menambah pembagian keperluan hidup "in natura" sepanjang keuangan Negara memungkinkannja.

Erat djuga hubungannja dengan adanya inflasi moneter adalah adanya tjadangan devisa Negara yang mempunyai sumber utama didalam bidang export. Menurut angka² Dana Devisa maka export kita ada tendensi menurun dan berdjumlah dalam tahun (tanpa minjak bumi):

1962 US \$ 470 djuta.

1963 US \$ 412 djuta.

1964 US \$ 430 djuta.

1965 US \$ 400 djuta.

Berhubung dengan menurunnja tjadangan devisa dari hasil export itu pada waktu achir² ini untuk memenuhi kebutuhan barang² yang makin meningkat maka selain penjusutan terhadap tjadangan emas dan devisa Negara, dilakukan djuga import barang² atas beban hutang djangka pendek yang tidak menguntungkan kita. Menurut perdjandjian hutang djangka pendek biasanja disamping adanya suatu keharusan untuk mengembalikan hutang dalam waktu yang singkat kita djuga dikenakan ongkos² tambahan yang besar seperti bunga, provisi, risicopremi dan sebagainya. Defisit pada neraca pembayaran yang telah mendjadi besar menjebabkan sedjak Oktober 1965 posisi cash devisa mendjadi demikian buruknja sehingga kita tidak mungkin membayar angsuran dan bunga dari pin-djaman² luar negeri yang telah tiba saat pelunasannja. Djumlah backlog yang kita alami pada achir triwulan 1966 mentjapai US \$ 177 djuta yang terdiri dari hutang² djangka pandjang dan medium sebanjak US \$ 149 djuta dan hutang² djangka pendek (deferred payment) sebanjak US \$ 28 djuta.

Selain dari itu kewajiban² kita dalam tahun 1966 sendiri meliputi US \$ 353 djuta, jaitu jang berupa hutang djangka pandjang dan medium sebanjak US \$ 204 djuta dan hutang djangka pendek US \$ 149 djuta.

Kewajiban² internasional jang tidak dapat kita lunasi pada waktunja itu sudah barang tentu mempunyai pengaruh jang merugikan "credietwaardigheid" Negara dan prestise Bank Sentral kita pada chususnja.

Didalam gambaran keadaan ekonomi umum ini kami merasa perlu menundjuk pada suatu gedjala jang menurut pendapat kami perlu dikoreksi agar dapat tertjapai keadaan jang lebih adil dan merata. Menurut angka² jang tersedia maka djumlah uang jang beredar di Djakarta Raya dengan djumlah penduduk hanja kurang dari 4 djuta adalah 43% dari uang jang beredar diseluruh Indonesia jang berpenduduk sekarang lebih dari 106 djuta. Sebaliknya penerimaan padjak dari Djakarta Raya sendiri merupakan 40% dari penerimaan padjak di seluruh Indonesia.

Demikianlah beberapa keterangan setjara singkat untuk menggambarkan keadaan ekonomi kita pada waktu ini. Untuk keterangan jang lebih terperinci maka pada laporan ini dilampirkan beberapa daftar jang dapat dipeladjadi.

Sedjak diutjapkannya Statement politik ekonomi pada tanggal 12 April 1966 sampai hari ini belum banjak waktu untuk mengadakan pelaksanaan jang efektif daripada pokok² kebidjaksanaan jang tersimpul didalamnya. Diantara tindakan² jang dalam waktu pendek itu telah atau sedang didjalankan adalah seperti berikut.

Kami telah membentuk sebuah panitia untuk meneliti adanja projek² jang sedang diselenggarakan pada waktu ini dinilai projek² mana jang perlu dihentikan, dikoreksi atau dilangsungkan. Mungkin dalam waktu satu minggu lagi Panitia itu sudah selesai dengan laporannja. Tanpa melupakan kepentingan-kepentingan politis dan sosial dari tiap² projek, maka dari sudut kepentingan ekonomi dan keuangan negara dalam memberikan prioritas kepada projek² itu kami berpedoman seperti dibawah ini:

- a. Projek² jang telah ada dan mempunyai arti ekonomis penting perlu diteruskan dan diselesaikan sebaik mungkin.
- b. Projek² jang sedang dalam pelaksanaan dan manfaatnja ekonomis ada, akan tetapi tidak tinggi, dalam pelaksanaannja dapat di "slow-down"-kan atau dihentikan untuk sementara sambil menunggu tersedianja biaya.
- c. Projek² baru jang belum dimulai dengan pelaksanaan pembangunannja tidak perlu dikerdjakan, ketjuali bila projek² itu:
 - (1) mempunyai arti ekonomis penting,
 - (2) berupa projek quick-yielding,
 - (3) anggaran biajanja tersedia.

Pada waktu ini sedang diusahakan agar dapat disusun suatu Anggaran Belandja Negara 1966 jang benar² dapat didjadikan dasar buat usaha pemasukkan dan pengeluaran uang Negara. Dengan adanja Anggaran Belandja Negara itu akan diusahakan djangan sampai dapat terdjadi pengeluaran uang Negara jang tidak dapat didasarkan atas Anggaran Belandja itu, seperti jang banjak sekali terdjadi didalam waktu jang baru lampau. Selain itu Anggaran Belandja 1966 belum selesai disusun maka untuk pengeluaran² keuangan diambil Anggaran Belandja 1965 sebagai pedoman.

Didalam bidang devisa sedang dikerdjakan penertiban organisasi dan administrasi didalam Bank Negara Indonesia Unit I (dahulu Bank Indonesia) dengan maksud agar Bank itu mendjadi satu² instansi resmi untuk menjalurkan pemasukkan dan pengeluaran devisa Negara. Instansi² lain jang dahulu dapat menguasai sendiri devisa jang dipergunakan oleh dengan fasilitas² khusus diusahakan supaya selanjutnja menjalurkan keperluan devisanja melalui Bank Negara Unit I. Hal jang demikian tidak berarti bahwa instansi² jang dahulu dapat menggunakan devisanja sendiri itu selanjutnja tidak dapat menggunakan devisa sama sekali. Jang dimaksudkan ialah supaja instansi² itu membententjana penggunaan devisa dalam satu tahun dan kemudian menggunakan saluran Bank tersebut untuk mendapatkannya setelah rentjana tadi disetujui oleh Pemerintah.

Dalam hubungan dengan penertiban lalu lintas devisa itu pada waktu ini sedang diusahakan untuk mengetahui adanja idzin² khusus buat export jang telah diterbitkan didalam waktu jang baru lampau. Idzin² itu sebagian telah dapat diketemukan. Maksud kami adalah untuk menjalurkan usaha² export jang diusahakan setjara istimewa itu melalui saluran² dan peraturan² jang biasa agar dengan demikian dapat ditjegah manipulasi² jang dapat merugikan Negara dalam djumlah berpuluh² djuta dollar Amerika.

Disamping usaha untuk memperbesar pemasukan devisa maka kini sedang disusun pedoman untuk mengatur pemberian prioritas dalam penggunaan devisa Negara, agar dengan demikian devisa Negara itu dapat digunakan dengan manfaat ekonomis jang sebesar-besarnja.

Salah satu aspek dalam pemberian prioritas untuk penggunaan devisa itu adalah penertiban import jang tidak menjimpang dari R.I.B. Didalam penjusunan R.I.B. itu telah diambil sebagai dasar pemberian prioritas kepentingan nasional untuk membangun ekonomi umum. Dengan dasar itu maka diberikan prioritas import berturut-turut kepada:

1. import pangan, terutama beras.
2. import barang dan bahan² baku jang dapat menolong memperbesar export;
3. import barang dan bahan² baku dan penolong untuk memperbesar produksi;
4. import bahan² sandang.

Bersambung ke hal. 32

LAMPIRAN² KETERANGAN WAPERDAM EKUBANG DIMUKA SIDANG DPRGR PADA TANGGAL 6 MEI 1966

DJUMLAH UANG JANG BEREDAR (1961-1965)
(Rupiah miliar)

ACHIR	KARTAL		GIRAL		DJUMLAH
	Posisi	%	Posisi	%	
1961 Desember	42,54	72	19,10	28	67,64
1962 Desember	102,85	76	33,05	24	135,90
1963 Maret	107,71	75	36,26	25	143,97
Djuni	133,25	75	44,91	25	178,16
September	147,43	70	63,87	30	211,30
Desember	175,46	67	87,90	33	263,36
1964 Maret	200,24	63	116,05	37	316,29
Djuni	256,47	66	132,86	34	389,33
September	320,47	66	163,51	34	483,98
Desember	451,91	64	251,22	36	703,13
1965*) Maret	629,50	76	193,53	24	823,03
Djuni	812,89	73	303,99	27	1.116,88
September	1.188,95	71	487,67	29	1.676,62
Desember	2.170,18	73	812,24	27	2.982,42
1966*) Maret	4.235,14	84	796,65	16	5.031,79

*) Angka Sementara.

ANGKA INDEX BIAJA HIDUP DI DJAKARTA

Berdasarkan harga 62 matjam barang dan djasa²

(dasar: Djakarta, rata² Maret 1957 s/d Pebruari 1958 = 100)

Tahun/Bulan	Makanan	Perumahan	Pakaian	Lain ²	Umum
Djanuari 1961	194	164	526	208	221
Pebruari	199	167	511	211	224
M a r e t	220	171	504	223	239
A p r i l	220	172	503	223	239
M e i	216	173	500	239	239
D j u n i	211	174	494	232	235
D j u l i	231	172	507	234	244
Agustus	225	173	507	245	247
September	270	184	513	247	277
Oktober	302	197	549	259	304
Nopember	410	269	555	264	382
Desember	397	312	568	272	380
Djanuari 1962	595	439	617	288	527
Pebruari	694	460	678	333	605
M a r e t	841	465	798	491	736
A p r i l	666	465	841	546	639
M e i	683	466	895	619	667
D j u n i	680	487	1017	736	698
D j u l i	742	496	1203	853	774
Agustus	734	516	1296	747	761
September	710	518	1521	787	772
Oktober	743	571	1615	788	806
Nopember	796	640	1918	822	879
Desember	909	664	2090	870	976

ANGKA INDEX BIAJA HIDUP DI DJAKARTA

Tahun/Bulan	Makanan	Perumahan	Pakaian	Lain ²	Umum
Djanuari 1963	1128	765	2348	1059	1181
Pebruari	1206	836	2568	1205	1282
M a r e t	1257	838	2754	1281	1344
A p r i l	1301	850	2940	1371	1404
M e i	1415	854	3059	1394	1491
D j u n i	1391	943	3167	1520	1516
D j u l i	1411	941	3207	1564	1540
Agustus	1457	945	3187	1622	1578
September	1705	943	3344	1721	1765
Oktober	1844	978	3399	1777	1856
Nopember	2292	1159	3251	1777	2163
Desember	2314	1057	3268	1941	2226
Djanuari 1964	2599	1525	3681	1924	2458
Pebruari	3250	1503	3712	2002	2885
M a r e t	3793	1453	4017	2122	3271
A p r i l	2726	1464	4076	2230	2619
M e i	2678	1616	4288	2383	2650
D j u n i	2697	1648	4789	2436	2717
D j u l i	2673	1742	5399	2703	2810
Agustus	2953	1825	5773	2903	3063
September	3927	1793	6240	3083	3685
Oktober	4041	1874	6546	3716	3964
Nopember	4285	2172	7238	3925	4246
Desember	5272	2575	9572	4619	5234
Djanuari 1965	6936	3469	12090	6740	6968
Pebruari	8255	3719	12155	7756	8012
M a r e t	7458	3719	10862	8029	7444
A p r i l	7707	3815	10841	7930	7593
M e i	7680	4035	11807	9369	7938
D j u n i	8212	4231	13502	9710	8492
D j u l i	9843	5226	16248	11287	10141
Agustus	11100	8136	18317	13658	11823
September	14056	9725	20606	15349	14371
Oktober	19271	10575	28441	17479	18804
Nopember	23354	11574	32391	22179	22651
Desember	41404	17184	40447	27728	36347

REALISASI ANGGARAN PEMBANGUNAN TH. 1961 — 1966
(dalam djutaan Rupiah)

TAHUN	PENGELUARAN	PENERIMAAN	DEFISIT
1961	25,993	10.227	15.766
1962	34.466	4.190	30.276
1963	78.954	1.964	76.990
1964	142.204	3.628	138.576
1965	446.178	—	446.178
1966*)	299.300	—	299.300

*) Triwulan I dan angka² sangat sementara.

Sumber: Departemen Anggaran Negara

REALISASI PEMBIAJAN PEMBANGUNAN SELAMA TH. 1961 — 1966

(dalam djutaan Rupiah)

TAHUN	Pembiajan diluar Bapindo	Melalui Bapindo	DJUMLAH
1961	22.592	3.401	25.993
1962	16.096	18.370	34.466
1963	10.603	68.351	78.924
1964	7.850	134.354	142.204
1965	58.285	387.893	446.178
1966*)	213.568	85.732	229.300

*) Triwulan I

Sumber: Bapindo dan Bank Negara Indonesia Unit I

REALISASI PENGELUARAN DAN PENERIMAAN PEMERINTAH (th. 1961-1966)

(dalam djutaan Rupiah)

TAHUN	PENGELUARAN	PENERIMAAN	DEFISIT
1961	90.384	62.218	28.166
1962	122.245	74.018	48.227
1963	285.505	162.130	123.375
1964	681.328	283.386	397.942
1965**)	2.894.342*)	1.546.505	1.347.837
1966***)	2.585.500*)	— **)	—

*) Termasuk pengeluaran² Angg. Khusus, Kredit dan Devisa

**) Angka² sangat sementara

***) Angka² triwulan I dan bersifat sangat sementara

Sumber : Departemen Anggaran Negara.

PENGELUARAN SEMENTARA S/D TRIWULAN IV/1965

(dalam djutaan Rupiah)

No.	Djenis pengeluaran	Sipil	Angkatan Bersendjata	Djumlah
I.	1. Belandja Pegawai	251.169,5	378.044,4	629.213,9
	2. Pensiun	38.023,9	—	38.023,9
	3. Belandja Barang	171.151,8	136.692,4	307.844,2
	4. Bel. Pemeliharaan	13.662,8	47.626,2	61.249,0
	6. Penj. Pendp. Neg.	39.295,9	12.948,5	20.668,3
	5. Angk. Perdj. Dinas kpd. D.O.	7.719,8	—	39.295,9
	7. Subsidi/Bantuan	70.789,7	—	70.789,7
	8. Bunga/Tjitjilan	33.361,5	—	33.561,5
	Djumlah Angg. Biasa	625.174,9	575.371,5	1.200.546,4
II.	9. Angg. Pemb. Non Dev.	106.369,1	17.444,8	123.813,9
III.	10. Angg. Perusahaan	71.800,3	11.063,0	82.863,3
IV.	11. Angg. Perhitungan	5.229,4	468,8	5.698,2
	Djumlah seluruhnja: (I+II+III+IV)	808.573,7	604.348,1	1.412.921,8

Bersambung ke halm. 29.

Keterangan Pemerintah mengenai :

POLITIK LUAR NEGERI JANG DIDJALANKAN OLEH PEMERINTAH

Disampaikan Oleh Waperdam Bidang Sospol/Menlu Adam Malik
Dimuka Sidang DPR-GR. Pada Tgl. 5 Mei 1966

Saudara Ketua jang Mulia,
Para Anggota DPR-GR jang terhormat,
Assalamu'alaikum W.W.

Malam ini saja untuk pertama kali berhadapan dengan DPR-GR dalam kedudukan saja sebagai Wakil Perdana Menteri Bidang Sosial-Politik dan Menteri Luar Negeri. Kesempatan ini akan saja gunakan untuk memberikan keterangan seperlunya mengenai politik luar negeri jang akan didjalankan oleh Pemerintah.

Garis² besar mengenai dasar dan tudjuan politik luar negeri jang dianut oleh Pemerintah telah saja kemukakan dalam pernyataan saja kepada pers beberapa waktu jang lalu. Dalam pernyataan itu saja tegaskan, bahwa politik luar negeri Indonesia tetap berdasarkan pada dan dipimpin oleh falsafah Pantja Sila dan bertudjuan jang sama dengan jang telah digariskan sebagai tudjuan² dari Revolusi Indonesia, jaitu pertama kesatuan negara Republik Indonesia, kedua pembangunan suatu masyarakat jang adil dan makmur materiil dan spirituil atau masyarakat sosialis Pantja Sila dan ketiga ikut berusaha mentjiptakan suatu dunia baru jang bebas dari penghisapan manusia atas manusia, penghisapan suatu bangsa atas bangsa lain.

Djelaslah, bahwa politik luar negeri Pemerintah tetap berakar pada Revolusi Indonesia dan mengabdikan pada Revolusi Indonesia. Dalam usaha untuk mentjapai tudjuan² tadi, maka Pemerintah harus mendjalankan suatu politik luar negeri jang sesuai dengan dan mengabdikan pada kepentingan nasional. Kepentingan nasional inilah baik materiil maupun idieel, jang akan mendjadi patokan bagi Pemerintah dalam menentukan bentuk politik luar negerinja. Dalam melaksanakan politik luar negeri Pemerintah akan berpangkal pada realitas kepentingan nasional djangka pendek dan djangka pandjang dan akan berusaha menghindarkan diri dari wishful thinking jang hanya merugikan negara.

Bagi Pemerintah tuntutan² rakjat pada waktu ini jang memantjar dari hati nurani rakjat kita akibat penderitaan selama ini akan mendjadi pedoman bagi politik luar negeri dan diplomasi-nja. Pemerintah telah mengadakan penilaian kembali dari kebidjaksanaan politik luar negeri selama ini dan menentukan tjara pendekatan baru (new approach) jang disesuaikan dengan tuntutan² hati nurani rakjat itu.

Seterusnya Pemerintah akan berusaha untuk mengadakan hubungan persahabatan jang baik dengan semua negara. Oleh karena itu politik luar negeri Indonesia hanya bisa bersifat bebas, tidak a priori memihak, dan sekali gus bersifat

aktif untuk ikut berusaha mentjiptakan s dunia dan tata-masyarakat bangsa² jang bar sesuai dengan tjita² revolusi Pantja Sila.

Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan, wa politik luar negeri Indonesia akan berpedu pada dua pokok dasar, jaitu pertama kepenti nasional jang diperhitungkan setjara realistis, kedua kenjataan² jang terdapat dalam c internasional agar bisa digunakan untuk me pai tudjuan² Revolusi Indonesia dalam mer takan dunia dan tata-masyarakat bangsa baru. Pemerintah akan bekerdjasama dengan negara² lain didunia, dengan organisasi² dan dan-badan internasional jang ada, demi ke tingan nasional Indonesia untuk menanggul kesulitan² ekonomis jang kita hadapi seka dan demi perdjungan kita untuk memba dunia baru jang di-idam-idamkan oleh Rev Indonesia. Pemerintah akan bekerdjasama ngan negara² lain, dalam rangka bilateral ata multilateral, disegala bidang : politik, eko kebudajaan, dan lain² selama kerdjasama memberi manfa'at kepada kepentingan nas dan dapat makin mendekatkan kita kepad djuan Revolusi kita.

Perkenankanlah saja sekarang membe pendjelasan jang agak terperintji mengenai berapa aspek penting dari foreign policy nesia.

Mengenai persoalan "Malaysia", Pemer sedang mempertimbangkan langkah² jang diambil untuk mentjari penjelesaian men "Malaysia" melalui djalan² damai atas dasar nila Agreement. Politik konfrontasi jang lankan Pemerintah selama ini mempunja tudjuan pokok, jaitu :

1. Menggagalkan konsepsi "Malaysia" t an Inggeris jang merupakan manif dari neo-kolonialisme, dan dengan dem memberikan kesempatan kepada Sabah dan rakjat Serawak untuk mer kan nasib sendiri melalui tjara² jang l bebas dan demokratis.
2. Likwidasi pangkalan² militer Inggeri penarikan angkatan bersendjata In dari Asia Tenggara jang merupakan c jang melingkungi Indonesia.

Pemerintah ingin menegaskan lagi, Indonesia sama sekali tidak mempunjai teritorial terhadap wilayah dari apa jang waktu ini menamakan dirinja "Malaysia". rintah hanya menghendaki terdjaminnja Serawak. Saja ulangi lagi, setjara bebas ! E menurut pendapat Pemerintah tjara² jang dilakukan dalam menentukan kehendak

yang telah dilakukan dalam menentukan kehendak rakyat² yang bersangkutan seperti terahir dilakukan oleh Panitia Michelmores yang dikomit oleh P.B.B. tidak memberi jaminan kebebasan itu. Pemerintah ingin menyelesaikan persoalan "Malaysia" setjara damai, agar dengan demikian bisa tertijpta suasana baru di Asia Tenggara yang memungkinkan tertjapainja permasalahan, stabilitas dan security yang selanjutnya memungkinkan pula kerdjasama antara negara² Asia Tenggara yang berkepentingan untuk kemajuan dan kemakmuran bersama dan masing². Dalam mentjari penyelesaian bagi persoalan "Malaysia" Pemerintah mendasarkan usahanya pada Persetudjuan² yang telah ditandatangani di Manila pada permulaan bulan Agustus 1963 oleh Presiden Indonesia, Presiden Pilipina, dan Perdana Menteri Malaya.

Tudjuan pokok kedua, yaitu likwidasi dari pangkalan² militer Inggeris disekitar kepulauan Indonesia, khusus di Asia Tenggara, akan diperjuangkan terus. Pemerintah tetap berpendapat bahwa security, perdamaian di Asia Tenggara adalah semata-mata tanggung djawab dari negara² dalam daerah itu. Pangkalan² militer asing tidak merupakan suatu sumbangan positif bagi perdamaian dan security, malahan sebaliknya bisa mengantjam perdamaian dan security ini. Pemerintah ingin mentjiptakan kondisi² dimana antara negara² tetangga di Asia Tenggara terdapat suatu hubungan persahabatan yang ichlas dan harmonis, sehingga tertijpta suasana saling pertjajajempertjajai antara bangsa² tetangga yang dapat dikatakan serumpun. Dengan adanja suasana demikian hilanglah alasan bagi adanja pangkalan² militer asing didaerah Asia Tenggara ini. Usaha untuk mendjamin perdamaian dan security merupakan tanggung djawab bersama dan dilaksanakan bersama-sama antara negara² Asia Tenggara yang bersangkutan.

Dalam rangka usaha mentjari penyelesaian yang tepat bagi persoalan "Malaysia" inilah Pemerintah sudah mengambil kebidjaksanaan akan mengu-ai Singapura yang sudah melepaskan diri dari "Malaysia". Pengakuan ini dilaksanakan dalam waktu se-singkatnja dan akan diikuti dengan pembukaan hubungan diplomatik yang lazim dengan Singapura. Disamping pertimbangan² politik dalam rangka usaha menyelesaikan persoalan "Malaysia", pengakuan Singapura dan pembukaan hubungan diplomatik dengan negara itu dju-mempunyai aspek² ekonomis dan perdagangan. Pemerintah bermaksud menormalisir hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Singapura. Ini itu tidak berarti, bahwa Pemerintah akan memperbaiki saluran² ekonomi dan perdagangan langsung yang kita selenggarakan selama 1.5 tahun terahir ini semendjak hubungan dengan Singapura terputus. Malahan sebaliknya, Pemerintah akan tetap berusaha untuk memper-

luas dan memperkuat saluran² langsung yang menguntungkan Indonesia.

Djuga pertemuan yang telah berlangsung di Bangkok antara Menteri Luar Negeri Pilipina, Narciso Ramos, dan saja, dapat dilihat dalam rangka usaha Pemerintah untuk mentjari penyelesaian bagi persoalan "Malaysia", disamping tudjuan penting untuk mendjernihkan hubungan Indonesia — Pilipina yang bersifat bilateral. Pertemuan itu telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk bertukar fikiran setjara terus terang dari hati kehati. Menlu Ramos dan saja telah mengadakan pembitjaraan empat mata mendjelaskan posisi dan kebidjaksanaan politik Pemerintah masing², tidak saja mengenai hubungan bilateral, tetapi djuga mengenai persoalan² Asia Tenggara dan perkembangan dunia umumnya.

Kiranya saja boleh menjatakan disini, bahwa saja telah dapat mejakinkan Menlu Ramos akan tekad Indonesia untuk mengadakan hubungan tetangga baik dan persahabatan yang akrab dengan Pilipina dan disamping itu akan kehendak Indonesia yang bonafide dan sungguh² untuk berusaha mentjari penyelesaian setjara damai dari persoalan "Malaysia". Pemerintah ingin berusaha supaya tudjuan² politik konfrontasi terhadap "Malaysia" bisa tertjapai dalam waktu sesingkat mungkin melalui tjara² damai.

Sekali lagi pemerintah menegaskan pendirianja, bahwa Indonesia tidak mempunyai ambisi territorial apapun terhadap "Malaysia". Bila Kuala Lumpur bersedia memberi djaminan² seperlunya yang memungkinkan rakyat Sabah dan Serawak menentukan nasib mereka melalui tjara² yang benar² bebas, maka persoalan "Malaysia" segera bisa diselesaikan. Pemerintah akan menghormati keputusan rakyat yang bersangkutan, yang diambil dalam suasana dan melalui prosedur demokratis yang benar² mendjamin kebebasan memilih bagi mereka.

Saudara Ketua,

Achir² ini kita telah mengalami kesulitan-kesulitan dalam hubungan dengan R.R.T. R.R.T. terangan memperlihatkan ketidak-sanggupannja untuk memahami perkembangan di Indonesia semendjak peristiwa Gestapu. Semendjak peristiwa Gestapu itu R.R.T. terus-menerus menjerang Indonesia, dan sifat serangan² itu bertambah lama bertambah sengit tanpa mengindahkan kejdjian² yang sebenarnja, melalui pers dan radio, dengan tjara² dan nada yang tidak bertanggung djawab, sehingga menjebabkan reaksi dikalangan masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang keturunan Tionghoa, dalam bentuk demonstrasi² terhadap Perwakilan² R.R.T. di Indonesia. Untuk memahami perkembangan di Indonesia serangan yang tidak bertanggung djawab dari pihak R.R.T. yang dianggap penghinaan oleh masyarakat Indonesia.

Sampai pada waktu ini Pemerintah R.R.T. telah menjampaikan k.l. 40 nota protes, tegasnja 33 nota protes dan 10 nota complaint, kepada Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar-nja di Djakarta atau K.B.R.I. di Peking. Isi dari nota² itu menampakkan tidak adanja pengertian sama sekali dipihak R.R.T. tentang suasana dan perkembangan sebenarnja di Indonesia; mereka memutar-balikkan fakta demikian rupa, sehingga Pemerintah tidak melihat gunanja untuk meladeni nota itu satu per satu. Dari pihak Indonesia telah disampaikan nota djawaban sedjumlah lima buah, tetapi apapun jang dikemukakan oleh Pemerintah terbentur pada i'tikad tidak baik dari pihak R.R.T. terhadap Indonesia.

Seterusnya R.R.T. ternjata telah memberikan suaka dan fasilitas kepada oknum² kontra-revolusioner dan subversif Indonesia jang lari ke Peking untuk menghindarkan diri dari keamarahan rakjat jang menuntut pertanggung djawab dan pengadilan mengenai aktivitas² dan tindakan² anti-nasional mereka selama ini. R.R.T. malahan telah menggunakan penghianatan² ini untuk kapanje anti-Indonesia mereka, seperti ternjata dari pertemuan apa jang menamakan dirinja sekretariat P.W.A.A. di Peking. Tindakan² demikian djelas merupakan suatu sikap tidak bersahabat jang menjulitkan bagi Pemerintah untuk memupuk hubungan baik dengan R.R.T.

Mengenai pemulangan warganegara R.R.T. ketanah leluhurnja, Pemerintah Indonesia berpendirian, bahwa tidak akan menghalangi kehendak mereka untuk kembali ke R.R.T. Tetapi Pemerintah tidak bersedia dan samasekali tidak berkewadajiban untuk menjediakan alat² pengangkutan bagi mereka itu. Pemerintah tidak mengusir mereka. Djika mereka hendak meninggalkan Indonesia adalah atas kemauan sendiri dan segala tanggung djawab terletak pada mereka dan Pemerintah R.R.T. jang mengandjurkannja.

Sungguhpun hubungan Indonesia dengan R.R.T. menghadapi masa sulit jang disebabkan oleh tidak mau mengertinja R.R.T. mengenai situasi dan perkembangan di Indonesia, dan walaupun Indonesia dihadapkan dengan tindakan² provokatif dari pihak R.R.T., pada prinsipnja Pemerintah tetap menginginkan hubungan normal jang baik dengan R.R.T. Dalam hubungan ini Pemerintah ingin mengingatkan R.R.T. akan prinsip² Dasa Sila Bandung jang djuga ditandatangani oleh R.R.T., terutama pasal 4-nja jang menegaskan "tidak melakukan intervensi atau tjampur tangan dalam soal dalam negara lain".

Saudara Ketua,

Pada umumnja Pemerintah akan mempererat hubungan² baik jang telah ada dengan negara² tetangganja, seperti Thailand, Filipina, Kamboja, Laos, Vietnam, Djepang, Birma, Ceylon, Australia, New Zealand, dll.

Mengenai hubungan kita dengan Djepang perlu dikemukakan disini hubungan² ekonomi jang

telah ada selama ini dan usaha² memperluas lagi untuk kepentingan bersama.

Hubungan Indonesia dan Australia jang telah dimulai pada waktu Indonesia masih memperjuangkan kemerdekaan, dan jang sedjak itu berdjalan baik, pada suatu waktu agak dikurangkan oleh adanja tuntutan² kita supaya Irian Barat kembali kepangkuan Republik Indonesia. Dengan berhasilnja perdjjoangan kita untuk mengembalikan Irian Barat kepangkuan Republik Indonesia, maka berkurang pulalah kekeruhan itu. Segala persoalan² jang timbul berhubungan dengan masuknja Irian Barat kedalam wilayah Republik Indonesia, seperti soal² perbatasan dan pat diselesaikan dengan baik melalui perundingan² dan persetudjuan setjara sahabat.

Tetapi kemudian timbul pula kekeruhan² baru jang disebabkan oleh politik konfrontasi kita dengan "Malaysia", dengan negara mana Australia mempunyai perdjandjian² pertahanan. Dengan adanja maksud dan usaha kita untuk menjapai penjelesaian setjara damai dalam masa "Malaysia" ini dapat diharapkan akan pulih kembali hubungan baik dengan negara tetangga kita itu demi perdamaian dan ketentraman di daerah ini.

Mungkin perlu pula disebut disini bahwa Australia telah banjak memberi bantuan² kepada Indonesia dalam bentuk beasiswa² dan peralatan² dalam pelbagai bidang, seperti djalan halnja dengan Zelandia Baru dengan siapa kita mempunyai hubungan baik.

Tidak usah agaknja saja berpandjang lebar disini mengenai hubungan² baik kita dengan negara² tetangga jang serumpun dengan kita, jang Filipina. Hubungan² kita dengan Filipina jang telah menghasilkan usaha bersama untuk menjajahkan soal "Malaysia" dengan adanja Manila Agreements dan gagasan Maphilindo sudah cukup diketahui. Disamping itu usaha² kita bersama untuk menertibkan lalu lintas perorangan antara kedua Wilayah dengan adanja persetudjuan imigrasi dan pemulangan orang² jang masuk ke wilayah Filipina dengan tjara tidak sja.

Dibidang ekonomi hubungan ini mendjelaskan dalam perdjandjian² dagang mengenai kopra dan Pemerintah sudah mulai berusaha untuk mempererat lagi hubungan persahabatan dengan Filipina dengan memberi isi pada perdjandjian jang sudah ada. Pertemuan saja dengan Manila Filipina di Bangkok beberapa hari jang dapat dilihat dari sudut ini.

Saudara Ketua,

Pemerintah bermaksud mendjalankan politik Afrika-Asia jang realistis berdasarkan prinsip jang sudah ditetapkan oleh Konperensi Afrika ke-I di Bandung. Dalam hubungan ini Pemerintah akan menindjau hubungan² dengan negara² Asia dan akan berusaha mempererat hubungan itu dimana jang belum lantjar sejalanja dengan India, dan mempererat lagi

ungan yang sudah baik, seperti misalnja dengan
ambodja, Pakistan, Thailand, Burma, Ceylon,
an lain-lain.

Chususnja mengenai India Pemerintah bermak-
ad memperlantjar hubungan dengan India dan
meninjau setjara mendalam hubungan antara
Indonesia dan negara itu. Tidak dapat dilupakan
bahwa India merupakan salah satu negara yang
penting dalam politik internasional, chususnja
dalam politik Asia-Afrika dan politik non-blok.
Hubungan Indonesia-India pada waktu achir² ini
selubungi oleh suasana kurang pengertian ter-
hadap satu sama lain. Pemerintah akan berusaha
untuk mendjernihkan suasana antara Indonesia
dan India dan dengan demikian bisa memper-
lantjar dan memberi isi kepada hubungan terse-
ut. Perlu didjelaskan disini bahwa dengan mem-
perlantjar hubungan dengan India, Pemerintah
tidak bermaksud untuk mengurangi keakraban
hubungan dengan Pakistan. Malah sebaliknya,
Pemerintah tetap berusaha untuk mempererat lagi
hubungan yang sudah akrab dengan Pakistan itu
as dasar segala persetudjuan² yang telah ada
bidang politik, ekonomi dan kebudayaan. Indo-
nesia akan terus memperkembangkan kerdjasa-
a dibidang ekonomi dan perdagangan dengan
Pakistan yang digariskan hubungan persahabatan
India-Pakistan, Pemerintah ingin menjatakan
harapannja supaya persetudjuan Tashkent dapat
dilaksanakan kedua pihak dengan sebaik²nja
untuk membantu menumbuhkan solidaritas Afri-
a-Asia. Sedjalan dengan prinsip kerakjatan
Indonesia, Pemerintah yakin djalan penyelesaian
ng terbaik bagi masalah seperti sengketa
ashmir adalah djalan yang demokratis, yang
memberikan kesempatan kepada rakjat yang ber-
ngkutan untuk menentukan nasib sendiri. Ini
prinsip umum yang djuga melandasi pendirian
Indonesia mengenai kedudukan Serawak dan
bah dalam Federasi "Malaysia".

Chusus mengenai hubungan dengan negara²
Afrika yang sebagian besar memperoleh kemer-
kaannja dalam waktu sepuluh tahun terachir
Pemerintah ingin mengemukakan pendapat-
a sebagai berikut :

Sesuai dengan dan dalam rangka ketiga tudju-
Revolusi Indonesia, politik luar negeri kita
hadap Afrika bertudjuan menghimpun ke-
atan² anti-imperialis, anti-kolonialis dan anti-
kolonialis. Pelaksanaannja disesuaikan de-
n perkembangan didunia internasional pada
umunja dan di Afrika pada chususnja serta de-
n kebutuhan²/kekuatan² nasional Indonesia.
Ha taraf dewasa ini dapat dilakukan dengan
hempuh sebaik²nja solidaritas A-A dan meng-
hakan kerdjasama bilateral yang konkrit de-
n negara² Afrika yang menguntungkan kedua
ah pihak.

Landasan² idieel bagi politik ini adalah Dasa
Bandung dan non-alignment. Dasa Sila Ban-
g untuk bangsa² Afrika merupakan titik tolak
tif dalam perdjuaan mereka melawan ne-

kolim menudju emansipasi dan kemerdekaan na-
sional mereka masing², sedangkan non-alignment
yang didijwai oleh semangat Bandung mereka
lihat sebagai landasan untuk mengkonkretisir
perdjuaan menentang segala matjam interven-
si dan penetrasi.

Proses pertumbuhan kebangsaan dan kenega-
raan yang kini berlangsung di Afrika, berlainan
dengan di Asia, pada umumnja belum mentjapai
titik kristalisasi. Ini disebabkan, karena warisan
politik balkanisasi Afrika oleh negara² imperialis
Barat sedjak 1885 masih dirasakan yang a.l. me-
ngakibatkan, bahwa pertumbuhan tribalism ke-
arah nation hood tidak dapat berdjalan dengan
wadjar.

Kenjataan² diatas mengakibatkan, bahwa sete-
lah sebagian besar bangsa² Afrika memperoleh
kemerdekaan, mereka masih berpidjak pada
landasan² bekas pendjadjahan masing² di hampir
semua bidang, sedangkan dibidang ekonomi po-
tensi² mereka tetap terpetjah dengan tetap ber-
langsungnja balkanisasi Afrika oleh kaum impe-
rialis sesuai dengan kepentingan mereka masing².

Potensi² ekonomi Afrika, atau lebih tepat pe-
nguasaan potensi² ekonomi tersebut, mengakibat-
kan, bahwa Afrika sukar dapat menghindarkan
diri dari konflik Barat Timur yang ditambah pu-
la dengan adanja pertentangan² kepentingan,
baik dalam blok Barat maupun dalam blok Timur
sendiri.

Kenjataan, bahwa k.l. 95% perdagangan inter-
nasional Afrika masih dilakukan dengan negara²
kapitalis dan hanja 5% dengan negara² komu-
nis menundjukkan, bahwa Afrika masih merupa-
kan daerah yang kekajaan alam dan buminja ma-
sih dikuasai oleh negara² kapitalis. Sehubungan
dengan ini, mengingat, bahwa hasil² ekspor kita
dengan negara² Afrika adalah tidak komplemen-
ter, perdagangan bilateral sukar dapat diadakan ;
kerdjasma ekonomi dengan negara² Afrika oleh
sebab itu bersifat internasional dengan tudjuan
mengusahakan perbaikan kualitas, penentuan
marketing dan price policies dan sebagainja.

Dominasi Barat dan pertentangan² dikalangan
Barat sendiri (terutama pertentangan USA-Pe-
rantjis) mengakibatkan, bahwa proses kearah
pembentukan forum persatuan Afrika, sebagai
reaksi balkanisasi dimasa lampau, tidak dapat
terlaksana dengan lantjar.

Hal² tersebut diatas mengakibatkan, bahwa
Dasa Sila Bandung hendaknja tetap merupakan
landasan idiil kita dalam usaha kita untuk me-
ningkatkan hubungan baik antara Indonesia dan
negara² Afrika dan memupuk solidaritas Asia-
Afrika. Selain Semangat Bandung telah merupa-
kan perangsang utama bagi Afrika dalam per-
djuaan anti-nekolim, ia djuga mengandung
prinsip² non-interference dan pengutukan terha-
dap kolonialisme dalam selaga bentuk dan mani-
festasi, yang kesemuannja sungguh² mereka rasa-
kan mengingat adanja pertarungan kekuatan²
besar dibenua mereka, adanja banjak perbatasan²

artificial (akibat balkanisasi) antara mereka dan meluaskan penetrasi kekuatan komunisme dalam tahun² belakangan, terutama komunisme a la R.R.T. yang bersifat agresif.

Landasan² riil kerdjasama kita dengan Afrika adalah forum P.B.B. dan forum O.P.A. Bagaimanapun tantangan-tantangan terhadap dan kelemahan² yang diperlihatkan achir² ini oleh O.P.A., ia masih meruapkan satu²nja forum bagi semua negara Afrika untuk berkonsultasi satu sama lain mengenai persoalan² yang dihadapi kepada mereka, a.l. yang mengenai pembebasan daerah² Afrika yang masih didjadjah.

Forum P.B.B. adalah landasan riil lain yang kelak harus kita pergunakan sebaik²nja, karena P.B.B. bagi negara² Afrika masih dirasakan mutlak perlu dalam taraf perkembangan mereka sekarang ini, baik dilihat dari segi ekonomis/finansial (bantuan² melalui Economic Commission for Africa dan International Bank for Reconstruction and Development), maupun dari segi perjuangan anti-kolonial (panitya 24 negara untuk dekolonisasi) dan segi security mereka sebagai negara.

Keluarnya Indonesia dari P.B.B. oleh sebab itu tidak dapat mereka pahami dan terima, karena dengan tindakan itu mereka merasa dirugikan, karena kehilangan teman seperjuangan yang kuat dikalangan kelompok Afrika-Asia dalam badan internasional tersebut.

Dalam usaha memupuk solidaritas Asia-Afrika, kita hendaknya djangan mengabaikan approach bersifat non-governmental (press, kebudayaan, perburuhan, dan sebagainya) yang bersih dari gejala² ikut tjampur tangan dalam urusan² mereka, sesuai politik aktif dan bebas kita, khusus pada saat kita dewasa ini menegakkan kembali pribadi Bangsa dan Revolusi Indonesia yang berlandaskan Pantja Sila. Dalam hubungan ini penggunaan saluran² untuk approach ini perlu kita perluas/perbaiki, karena terbukti, bahwa dalam masa yang sudah² saluran² tersebut diperalat dan dikuasai oleh satu golongan dan ideologi sadja. Selain mengakibatkan diperolehnja gambaran subjektif mengenai Afrika oleh kita dan mengenai Indonesia oleh Afrika, situasi demikian telah menimbulkan penghianatan ditubuh organisasi² bersangkutan terhadap Revolusi Pantja Sila serta menjelewengkan kemurnian semangat kerdjasama Asia-Afrika, sehingga menimbulkan tjuriga dan tidak pertjaja dikalangan negara² Afrika-Asia.

Mengenai hubungan kita dengan negara² Arab Pemerintah tetap berusaha untuk memelihara dan memperkuat kerdjasama yang baik dan erat dengan negara² sahabat ini.

Saudara Ketua,

Pemerintah djuga akan menindjau setjara mendalam hubungan² yang telah ada dengan negara² Eropa, baik Timur maupun Barat. Khusus mengenai hubungan dengan negara² Timur Pemerintah dapat menjatakan bahwa hubungan ini pada umumnya tidak dipengaruhi oleh per-

kembangan² di Indonesia semendjak peristiwa Gestapu. Memang ada gejala yang menundjukkan kurang adanja pengertian pada masyarakat di negara² Sosialis Eropa Timur mengenai perkembangan achir-achir ini di Indonesia. Pemerintah akan berusaha untuk menanam pengertian yang setepat-tepatnja mengenai situasi dan perkembangan di Indonesia pada masyarakat dan Pemerintah dinegara-negara Sosialis di Eropa Timur, sehingga dengan demikian dapat didjama hubungan persahabatan dan kerdjasama yang lebih erat dengan negara² ini. Khusus mengenai Unie Sovjet Pemerintah akan berusaha untuk menghilangkan segala keragu-raguan djika masa ada, dipihak Pemerintah dan rakjat Unie Sovjet terhadap maksud bangsa dan Pemerintah Indonesia untuk mengadakan hubungan persahabatan yang baik dan kerdjasama yang erat disegala bidang dengan Unie Sovjet. Pada kesempatan ini Pemerintah menjatakan lagi penghargaan yang tinggi dan terimakasihnja terhadap bantuan yang diterima selama ini dari Unie Sovjet dan atas pengertian yang diperlihatkan oleh pihak Unie Sovjet terhadap perkembangan baru di Indonesia.

Seterusnya Pemerintah djuga akan berusaha untuk mempererat lagi hubungan baik dan kerdjasama disemua bidang dengan negara² sahabat yang lain di Eropa Timur seperti Yugoslavia, Tjecoslovakia, Hongaria, Rumania, Polandia, Bulgaria, Republik Demokrasi Djerman.

Mengenai hubungan dengan negara² Eropa Barat Pemerintah ingin meneruskan hubungan persahabatan dan kerdjasama baik dengan negara-negara tersebut, khusus hubungan yang meliputi ekonomi dan perdagangan. Kelihatan achir-achir ini negara² Eropa Barat berangsur-angsur memperoleh pengertian yang lebih baik terhadap situasi dan perkembangan di Indonesia. Pengertian yang lebih baik inilah moga² bisa menghasilkan kerdjasama yang saling menguntungkan dibidang ekonomi perdagangan antara Indonesia dengan negara² Eropa Barat; a.l. hubungan dengan Nederland, Djerman Barat, Perantjis dan Italia menampakkan kemadjuan² yang njata.

Saudara Ketua,

Mengenai hubungan dengan Amerika Serikat Pemerintah mengkonstatir timbulnja pengertian yang lebih baik tentang politik luar negeri Indonesia. Pemerintah bermaksud untuk memperlantjar kembali hubungan dengan Amerika Serikat terutama hubungan² dibidang kerdjasama ekonomi, perdagangan, tehnik d.l.l. Dalam paditu Pemerintah Indonesia tetap berpendirian tegas menjokong perdjoangan rakjat Vietnam melawan intervensi militer Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia ingin melihat penyelesaian soal Vietnam berdasarkan Geneva-Agreement sesuai dengan kehendak dari rakjat Vietnam sendiri. Penyelesaian soal Vietnam atas dasar kehendak yang dinjatakan setjara bebas oleh rakjat Vietnam tanpa intervensi dari pihak manapun dik-

oleh Indonesia sebagai jalan satu²nja untuk mulihkan perdamaian di Vietnam. Pemerin-berpendapat agar Amerika Serikat menarik kekuatan militeernja dari Vietnam dan menjerah-penyelesaian persoalan Vietnam kepada rak-Vietnam sendiri.

Tengenai hubungan Indonesia dengan negara²Amerika Latin Pemerintah menjatakan akan berusaha meneruskan dan mempererat lagi hu-gan persahabatan yang baik yang ada antara onesia dan negara² Amerika Latin.

Saudara Ketua,

alam mendjalankan politik luar negeri yang sifat bilateral terdjadilah pertimbangan² poli-Nefos kita sesuai dengan tudjuan revolusi onesia untuk berusaha membangun suatu du-baru bersama-sama dengan kekuatan² prosif-revolusioner didunia. Pemerintah tetap usaha untuk mengadakan Conefo pada itu dan kesempatan yang tepat dengan dja-an² seperlunja agar memang bisa tertjapai² yang kita kehendaki. Dalam hubungar. ini njaja saja diperkenankan menundjuk pada ke-ngan yang diberikan kemarin kepada DPR Wakil Perdana Menteri a.i. bidang Pertahan-lan Keamanan/Menteri Panglima Angkatan at Letnan Djenderal Suharto.

Pemerintah tetap menginginkan perobahan² da-PBB untuk dapat mempertimbangkan ikut njaja Indonesia dalam badan itu. Pemerintah mempergunakan tiap kesempatan yang ter-untuk turut mendorong proses perobahan arah yang kita kehendaki.

Saudara Ketua.

alam Statement saja kepada pers pada tang-April yang lalu telah saja tegaskan bahwa djaksanaan politik luar negeri wadjab diarah-kepada usaha untuk kemakmuran rakjat. Pe-ntah akan berusaha untuk mempererat hu-antnja dengan negara manapun djuga yang t memberi manfaat bagi kepentingan nasio-an kemakmuran rakjat.

Kerdjasama ekonomi antara Indonesia dan baik Barat maupun Timur, akan terus di-as dan ditingkatkan, tanpa sjarat² yang me-an kepentingan nasional.

alam hubungan kerdjasama ekonomi ini sa-disesalkan, bahwa walapun Pemerintah Indo-tetap ingin memelihara hubungan baik de-RRT, pihak RRT telah mengambil tindakan² a uniteral, sehingga terdapat penghentian a pelaksanaan perdjandjian-perdjandjian telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

api pada umumnja dengan tertjiptanja ik-ng baik dalam hubungan kita dengan dunia maka pasti akan dirumuskan kerdjasama mi yang se-effektif²nja dengan berbagai ne-didunia. Menurut reaksi-reaksi yang dapat kkap, politik Pemerintah kelihatannja men-sambutan yang baik dinegara² lain. Berba-

gai pernyataan telah diterima dari negeri tsb. yang menunjukkan adanya pengertian dari pihak me-reka terhadap persoalan ekonomi yang kita hadapi serta adanya kesediaan untuk membitjarakan soal kerdjasama ekonomi yang lebih luas untuk ke-pentingan bersama antara Indonesia dan negara² yang bersangkutan.

Suatu unsur dalam hubungan ekonomi luar ne-geri yang djuga mendapatkan perhatian Pemerin-tah ialah kerdjasama ekonomi yang bersifat mul-tilateral dalam organisasi² internasional yang khusus bergerak dibidang ekonomi. Kerdjasama demikian ini dirasakan membawakan manfaat bagi kehidupan ekonomi dalam negeri. Oleh ka-rena itu telah dipertimbangkan untuk tetap mem-pertahankan keanggotaan Indonesia dalam badan² tersebut dan mengambil manfaat yang sebesar²nja dari keanggotaan itu.

Dalam rangka kerdjasama multilateral ini Pe-merintah sangat memperhatikan kerdjasama de-ngan negara² tetangga atau kerdjasama regional yang perlu dipupuk demi keamanan dan kesedjah-teraan Asia Tenggara dimana termasuk Indonesia.

Dalam rangka lebih luas Pemerintah akan tet-ap melandjutkan usaha² kerdjasama yang se-effektif²nja dalam rangka AA atas dasar saling menguntungkan.

Seterusnja Pemerintah akan mempertahankan keanggotaan Indonesia dalam badan² internasio-nal yang ada dibidang commodities untuk men-djamin pemasaran atau melindungi kepentingan kita bagi hasil² ekspor Indonesia, seperti minjak bumi, timah, karet, kopi, dan gula.

Saudara Ketua,

Untuk melaksanakan politik luar negeri yang aktif dan bebas dan mendjalankan diplomasi yang tepat maka dibutuhkan sesuatu organisasi yang efisien dan kompak. Untuk maksud tersebut di-perlukan pedjabat² yang bermutu dan capabel, djudjur dan peuh rasa tanggung djawab sesuai dengan kebutuhan revolusi Indonesia pada taraf sekarang.

Sesuai dengan maksud itu, pimpinan Kemente-rian Luar Negeri telah mengambil langkah² per-tama guna menindjau kembali susunan persona-lia setjara keseluruhan, baik dipusat maupun di-perwakilan² diluar negeri.

Tindakan² pembersihan sudah dimulai dengan dibentuknja Panitia Penertiban pegawai yang kini sedang mendjalankan tugasnja.

Saudara Ketua,

Sebelum mengachiri keterangan saja ini, per-kenankanlah saja dari mimbar ini mengutjapkan terimakasih banjak atas segala bantuan berupa apapun djuga dari negara² asing untuk meringan-kan penderitaan dan beban rakjat Indonesia aki-bat bentjana alam diberbagai daerah di Tanah Air kita.

Bersambung kehal. 35.

Keterangan Pemerintah mengenai :

BIDANG PERTAHANAN/KEAMANAN

Disampaikan oleh WAPERDEM a.i. bidang
Pertahanan Keamanan LETNAN DJENDRAL
SOEHARTO dimuka Sidang D.P.R. - G.R.
pada tanggal 4 Mei 1966.

Saudara Pimpinan dan segenap anggota
Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong, jang
kami hormati,

Oleh Saudara² sekalian kepada kami diminta
untuk memberikan keterangan sekedarnja menge-
nai program Pemerintah, ciususnja dibidang ke-
Waperdaman kami, jaitu pertahanan dan keama-
nan, jang disertai dengan iringan harapan pula
kepada Saudara², bantuan dalam rangka kerdja-
sama untuk mengabdikan kepada amanat penderi-
taan rakjat.

Tentu sadja, saudara² sekalian program
pembidangan kami itu, hanja merupakan bagian
belaka daripada keseluruhan program Pemerin-
tah, oleh karena bukankah pertahanan/keamanan
itu adalah sekedar tut-wurihandajani, jang tentu
saja dinamis-aktif, terhadap program keseluru-
han daripada Pemerintah.

Sedangkan keseluruhan program Pemerintah,
dengan taktik-pragmatis peng-ambeg-parama-
arta-annja, adalah salahsatu pelaksanaan jang
terpenting daripada program umum revolusi
Indonesia.

P E N D A H U L U A N

Dwikomando Rakjat dan program umum Revolusi.

Saudara² dan segenap anggota jang kami
hormati,

Dari namanja, jaitu Kabinet Dwikora jang
disempurnakan lagi, telah mengedjawantahkan
program Pemerintahannja, jaitu pelaksanaan
Dwikora Rakjat, (1) **perhebat ketahanan revo-
lusi**; (2) membantu perdjjuangan revolusioner
rakjat² Malaya, Singapura, Sabah, Serawak dan
Brunai untuk membubarkan negara boneka
„Malaysia”.

Tentu sadja, pengalaman komando rakjat
jang pertama dan kedua, satu sama lain berhu-
bungan erat sekali, timbal-balik, pengaruh-mem-
pengaruhi, serasi, bahkan sesungguhnya pengala-
man komando jang kedua, sama sekali tidak boleh
mengabaikan hingga mengorbankan komando
rakjat pertama. Selama ini, dalam rangka mawas
diri, sangat tersasa oleh kita jang pengedepanan
pelaksanaan komando rakjat kedua, telah me-
nimbulkan kelengahan kita terhadap ketahanan
revolusi kedalam; demikian lengah, hingga
terninabobok, dapat dichianati, ditikam dari
dalam oleh Partai Komunis Indonesia dengan
„Gerakan 30 September”nja.

Sedjarah untuk kesekiankalinja pula tel-
kita sia²kan.

Saudara² jang terhormat,

Adapun kebidaksanaan umum pelaksana-
Dwikomando Rakjat itu sendiri, adalah hanja
merupakan bagian daripada keseluruhan progra-
umum revolusi, jaitu :

- (1) pembentukan Negara Republik Indonesia
jang berbentuk negara kesatuan dan negara
kebangsaan, jang demokratis, dengan wilayah
kekuasaan dari Sabang hingga Merauke;
- (2) pembentukan satu masyarakat, jang adil dan
makmur, materiil dan spirituiil, dalam wadah
Negara Republik Indonesia;
- (3) pembentukan dunia baru, penuh dengan
perdamaian, persahabatan, tiadanya penindas-
san oleh manusia terhadap sesama manusia.

Sungguh, konstitusi, jang kita susun di tahun
1945 dahulu, sebelum kita satu sama lain men-
depankan vested-interest, sebelum mengenal per-
tentangan kepentingan antara kita, telah men-
ngandung nilai² sastra jang agung, selain nilai
juridis jang sedjuk mengajomi.

Bukankah mengenai program umum revolusi
ia telah mengemukakan perumusan jang berik-

„..... melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indo-
nesia dan untuk memadjukan kesedjahteraan
umum mentjerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial,

Apabila, antara program Dwikomando Ra-
kjat kita hubungkan satu sama-lain dengan pro-
gram umum revolusi, maka akan nampak djelas
bahwasanja program Dwikomando Rakjat adalah
djembatan pengantar belaka daripada program
umum revolusi hingga karenanja djuga tidak
boleh menghambat apalagi merusak program
umum revolusi itu sendiri.

KONSEPSI STRATEGI DIBIDANG PERTAHANAN-KEAMANAN.

A z a s

Saudara² sekalian jang kami hormati.

Dengan pangkaltolak tekad-kejakinan itu
maka dalam rangka program umum pemerin-
han, sebagian daripada program umum revolusi
kami berusaha mentjoba mengemukakan gagasan
di bidang ke-Waperdaman kami, jaitu konsep
strategi pertahanan-keamanan, jang hendak
meng-tut-wuri-handajani program umum per-
rintahan tadi, oleh karena memang merupakan
bagian daripadanya.

Azas jang kami tempuh dalam mengemul-
kan gagasan ini, ialah :

-) realisme, kami memberanikan diri untuk melihat kenyataan politik, akan tetapi dengan samasekali tidak meninggalkan basis ideologi Pantjasila kita;
-) kepentingan nasional harus di-ambeg-paramartakan dalam keserasiannya dengan kepentingan internasional.
-) politik luar negeri adalah merupakan kelanjutan yang wajar daripada politik dalam negeri;
-) perekonomian rakyat harus diambeg-paramartakan dalam keserasiannya dengan politik; dan
-) pemikiran, perentjanaan, pimpinan pelaksanaan dan pengawasan dipadukan dengan azas tata-pemerintahan dan tatanegara berdasarkan kepada konstitusi 1945, dimana hubungan itu peranan Saudara² sekalian yang kami hormati, adalah sangat penting.

D a s a r

Saudara² Pimpinan dan Saudara² sekalian yang kami hormati.

Dasar tempat pidjakan kami, dalam mengemukakan gagasan ini, ialah :

-) Undang² Dasar 1945 dalam kemurniannya sebagai dasar konstitusional-struktural;
-) Pantjasila sebagai dasar idiil, sebagaimana perumusannya djelas nampak dalam Pembukaan (Preambule) Undang² Dasar 1945;
-) Politik luar negeri bebas aktif dalam rangka tujuan ketiga program umum revolusi;
-) Fisik geografi dari kepulauan yang berbentuk rangkaian kepulauan;
-) Ekonomis, yang masih dalam tingkat perkembangan dari agraris-industri kearah industri-agraris, dimana kekajaan alam yang terpendam belum diolah sebagaimana mustinja;
-) militer-defensif aktif dimana politik strateginja adalah perang revolusi Indonesia;
-) historis, perjuangan rakyat yang berabad² lamanya, dalam menuntut kemerdekaan, kesedjahteraan dan perdamaian;
-) mental-psychologis, kegotongrojongan, semangat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, yang tersimpul dalam amanat penderitaan rakyat, dimana terpadu keserasiannya kemerdekaan dan kesedjahteraan orang seorang dengan kemerdekaan dan kesedjahteraan bangsa sebagai suatu keseluruhan.

Saudara² sekalian,

Dalam upaya dibidang pertahanan-keamanan yang azas dan dasar dalam mentjapai tujuan program umum pemerintahan menudju kepada program umum revolusi, izinkanlah kami memukakan pula implementasi yang berwatak politis-taktis untuk itu semuanya. dengan tidak bermaksud melampaui bidang ke-Waperdam-an kami, akan tetapi kiranja memang telah serasilah dengan bidang ke-Waperdam-an Sosial-Politik, apabila kami

- kemukakan, bahwa politik luar negeri, taktis harus dilaksanakan, menurut azas, dasar dan program² yang diatas tadi;
- (2) penglihatan terhadap dunia, hendaknya realistis-pragmatis, sehingga pengarahannya harus untuk kepentingan nasional, terutama kepentingan ekonomi rakyat diambeg-paramartakan dalam keserasiannya dengan upaya pertahanan dan keamanan;
- (3) pemulihan kembali kepertjajaan negara/bangsa lain terhadap maksud-tudjuan revolusi Indonesia, dengan tjara memperbanjak kawan daripada lawan, mendjauhkan kontradiksi dengan mentjari keserasian dalam hubungan, sesuai dengan falsafah kepribadian Indonesia, Pantjasila, kelintjahan diplomasi dan ketangguhan strategi pertahanan dan keamanan;
- (4) pelaksanaannya dilakukan dengan keluwesan dalam pendekatan dan penanggapan, oleh karena kekakuan dan kesombongan (pride, arrogancy) selalu membawa kegagalan;
- (5) hendaknya dapat dibedakan fungsi strategi dan fungsi taktik, keluwesan dalam taktik, terutama di bidang pemikiran-pengalaman perekonomian rakyat, djangan hendaknya seringkali dikorbankan oleh kekakuannya politik prestise.

MENTAL PSYCHOLOGIS

Saudara² sekalian yang budiman.

Kiranja, Saudara² akan sependapat dengan kami, apabila kami katakan disini, bahwa bagaimanapun baiknja sistim organisasi dan doktrin politik luar negeri yang berpadu dengan politik dalam negeri dan pertahanan-keamanan, akhirnya manusia² pelaksana pulalah yang penting akan dapat menentukannya. Oleh karena itu pemupukan kesadaran pengalaman Amanat Penderitaan Rakyat, yang telah duapuluh tahun berdjembatan emas kemerdekaan ini, harus terus menerus dilakukan. Kesadaran, bahwa segala pelaksanaan politik luar negeri, djuga dalam rangka pelaksanaan komando rakyat yang kedua daripada Dwi-komando Rakyat, minimal harus tidak merugikan kepentingan rakyat bangsa Indonesia, bahkan harus diabdikan kepada kepentingan kesedjahteraan tanahair dan bangsa kita.

Kiranja Saudara² akan sependapat dengan kami, pula apabila bagi pelaksanaan² itu diadakan penanaman pengertian yang praktis-pragmatis populer untuk tidak silau lagi akan impian prestise, sehingga kedalam mendjadi langkah, mudah ditusuk dari belakang oleh kontra revolusi dalam negeri, baik yang ada hubungannya dengan luar atau tidak.

Mereka, pelaksana² harus pandai mentrapkan perpaduan antara tudjuan dan alat-upaja, politik luar negeri, dalam negeri, pertahanan-keamanan, untuk akhirnya kesedjahteraan umum rakyat-

bangsa, dimana setiap manusia individu Indonesia merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi.

MASALAH CHUSUS

Saudara² sekalian jang kami hormati,

Masalah² khusus, jang termasuk antara lain dalam program pemerintahan, dan jang kami mintakan perhatian Saudara² sekalian khususnya dalam hubungan dengan masalah pertahanan-keamanan, ialah :

- (1) persoalan CONEFO jang meskipun bukannya suatu projek jang tidak penting, melainkan demi pengamanan pelaksanaannya, jang termasuk bidang kami, kiranya penjelenggaraannya perlu disesuaikan berdasarkan pertimbangan² sebagai berikut :
 - (a) kondisi mental-psychologis rakyat, dan hati nuraninya masih parah akibat petualangan kontra revolusi Gestapu/PKI;
 - (b) penilaian selanjutnya, menganggap perlu pengedeapanan dan peng-ambeg-paramartaan perekonomian rakyat, jang notabene situasi ekonomi keuangan belumlah memungkinkan; dan
 - (c). Keadaan Keamanan, terutama psychologis, akibat Gestapu/PKI dan terutama masih berkeliarannya oknum² kontra-revolusi dalam epiloognya Gestapu/PKI belum memungkinkannya pula. Itulah dibidang kami, jang tentu sadja dapat ditambah dengan bahan pertimbangan dari ke-Waperdam-an Sosial Politik.
- (2) Tidak pula kurang pentingnja masalah „Malaysia” di bidang pertahanan dan keamanan, jang meminta perhatian Saudara² sekalian pula.

Saudara² sekalian jang terhormat,

Sekali lagi, kami ingin menegaskan disini, bahwa pelaksanaan komando rakyat kedua, dimana „Malaysia” termasuk, tidakboleh samasekali menghamburkan dan mengkaburkan komando jang pertama, ialah ketahanan revolusi, keluar maupun kedalam, terhadap kolonialisme dengan segala bentuknja maupun terhadap subversi-kontra revolusi didalam, baik jang ada hubungan dengan luarnegeri maupun tidak.

Upaja-keluar, lebih² jang diluar, adalah se-kedar pilar keutuhan-kesatuan bangsa dan negara itu sendiri roboh, baik karena perongrongan dari dalam, maupun karena silau kita akan ke mertjusuaranja keluar. Bagaimana dapat kita mertjusuarankan, sedangkan keutuhan-kesatuan bangsa dan negara itu sendiri termakan oleh bubuk dari dalam, karena kurang kewaspadaan kita sendiri.

Keutuhan-kesatuan bangsa dan negara adalah sparat-mutlak, conditio sine qua non, akan lahirnja program² jang lain.

Olehkarena itulah maka komando rakyat, jang oleh rakyat sendiri sengadja ditempatkan didepan, jaitu dajatahan revolusi, haruslah dike-

depankan, lebih² tidak boleh dikaburkan dan dikorbankan hanya oleh komando² jang lain.

Dengan dasar rasa tanggungjawab di bidang ke-Waperdaman kami itulah, maka kiranya Saudara² jang kami hormati akan berkenan menanggapi gagasan² jang kami ajukan ini, ialah bahwasanja konfrontasi tidakperlu dikendorkan, bahkan dapat dilangsungkan, dengan tidak melulu mengedepankan phisik, melainkan dapat diimbangi dengan menggunakan keluwesan taktik. ialah :

- (1) pendekatan dengan upaja pemisah²an „kesatuannya Malaysia” itu sendiri;
- (2) mengimbangi operasi jang lebih penting, jaitu sosial-politik dan ekonomi.

Adapun dalam hubungan dengan kewaspadaan dan dajatahan revolusi kita, kami mintakan Saudara² sekalian, bahwa keutuhan-kesatuan djembatan-emas Republik Indonesia masih tetap dalam bahaya akan kemungkinan rivalitas Partai Komunis Indonesia, sesudah kegagalannya di Tiga Daerah, Sumatra Timur, Madiun dan jang terakhir ini Lubang Buaja. Djangan sampai hendaknya, kita tertendang lengah diluar, tetapi kembali pilar² djembatan-emas kita dikeroposi dari dalam.

Saudara² sekalian jang kami hormati,

Kepada Saudara² sekalian, kami mintakan pula perhatian, akan perlunya penindjauan kembali doktrin perang dan pembinaan potensi perang, jang dengan iktikad baik, oleh TNI/AD antara lain semula disinggasanakan dalam Tri Ubaya Sakti, akan tetapi telah dichianati oleh Gestapu/PKI, dengan gerakannya jang lepas dari penetrasi luar. Penglihatan kembali itu memang dimungkinkan, oleh karena ia memang tidak statis-eenmalig, melainkan dinamis, jang harus ditrapkan dengan suara hati nurani rakyat, jang mengchawatirkan datangnya bahaya terhadap tanahair dan bangsanja dari arah kedelapan penjuru-angin, bukannya hanya dari barat, selatan timur, djuga dari utara karena nafsu keserakahan ke selatan mentjari ruang-hidup, dari fihak manapun, djuga dari fihak jang selama ini kita dengan iktikad baik telah bergandengan-tangan menghadapi kolonialisme barat, tetapi ternyata telah mentjubit dari samping, kalau tidak hendak dikatakan turut menyusuk dari belakang bersama dengan unsur kontra-revolusi dari dalam.

P E N U T U P

Saudara² sekalian jang kami hormati,

Kemudian sekarang, Saudara² menanjakan tentang bantuan apa jang dapat diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong.

Mengapa Saudara² menganggap perlu untuk merendahkan diri, dengan melakukan pendekatan hanya dengan fungsi membantu.

Tidak, Saudara² bukan pembantu pemerintah. Lihat apa jang tersurat dan tersirat dalam konstitusi kita, nanti Saudara² akan tahu benar² dalam hubungannya dengan pemerintah. djuga pemerit

han jang dilimpahkan kepada kami di bidang Waperdaman pertahanan-keamanan jang dilimpahkan kepada kami, kami jang membantu ke- la eksekutif pemerintahan.

Pemerintahan kita sendiri, adalah organisasi manusia dalam mendjalankan kekuasaan-kewi- waan negara.

Karena menjadari akan segala kelemahan manusia, makhluk daripada Tuhan, maka setiap kegiatan pemerintahan, jang terdiri dari manusia² la, hendaknja dan selalu hendaknja diadakan transi² objektif, untuk tidak tjenderung ke arah kesewenang²nja pemusatan kultus perog- an, tetapi djuga tidak tjenderung ke arah njanja anarchisme-liberalisme.

Dan, konstitusi 1945, memberikan garansi² ektif. Dibidang tatapemerintahan :

menempatkan Menteri² pada hakekatnja jang sesungguhnya menurut kemurniannja Kons- titusi 1945, jaitu jang meskipun hanja meru- pakan Pembantu Presiden, akan tetapi hen- daknja dapat mendjalankan kekuasaan peme- rintah (pouvoir excutief) dengan iringan tanggungjawab, dalam praktek dan bukan pengedepanan dan perlindungan diri pada „bapak-isme”;

sebagai pimpinan kementerian, Menteri seha- rusnja mengetahui seluk-beluk hal² jang mengenai lingkungan pekerdjaannja, djuga dalam turut membantu Presiden dalam menentukan politik eksekutif, dan bukannya menganut falsafah „njumanggakaken bapak”;

untuk menentukan politik pemerintahan dan koordinasi dalam pemerintahan negara, para Menteri bekerdjasama satu sama lain se-erat²nja, dibawah pimpinan Presiden;

streamlining pemerintahan negara, djangan mendaknja seperti jang sudah, jaitu berat diatas seperti piramida jang terbalik, karena penjusunannja pun setjara konfeksi.

Dibidang tatanegara :

negara hendaknja berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata²;

berdasarkan atas perangkat konstitusi, seba- gai hukum dan tidak bersifat absolutisme, yaitu kekuasaan jang tidak terbatas, apapun amanja;

Madjelis Permusjawaratan Rakjat memegang kekuasaan tertinggi, pengedjahwantahan ke-aulatan seluruh rakjat: jang memegang keaulatan rakjat, menetapkan konstitusi, menetapkan garis² besar haluan negara, mengangkat Kepala Negara dan Wakil Ke- la Negara, serta membawahi Kepala Negara;

Presiden menjelenggarakan pemerintahan negara tertinggi berdasarkan mandat, jang

bukan blanko opdracht/mandat, dan ber- tanggungjawab setjara rasionil kepada Ma- djelis Permusjawaratan Rakjat, meskipun nanti datang masanja untuk mempertang- gungjawabkan karena kejakinan kepada Tuhan Jang Maha Kuasa;

(5) Presiden berkedudukan disamping Dewan Perwakilan Rakjat dalam kewenangan pe- rundang²an dan kewenangan penentuan anggaran pendapatan dan anggaran belandja Negara;

(6) kekuasaan pemeriksaan keuangan dan pengintensifannja, oleh badan di luar peme- rintahan, jang melaporkan hasil pemeriksa- annja kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Mengenai keadaan puing² (ruins) keuangan dan perekonomian, akibat jang sudah, sekarang hendaknja diberitahukan kepada rakjat, sebagai pendekatan seperti jang telah dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwono IX, agar supaja rakjat mengetahui ke-serieusannja keadaan.

Dalam hubungan itu semua, perlu dikede- pankan, seperti jang dikehendaki oleh konstitusi itu sendiri, hendaknja kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan.

Maksud baik jang dikandung semula oleh hak eksorbitan misalnja, ketjenderungannja selalu ke kesewenang²an, sebab tanpa garansi objektif mengenai penilaiannja, untuk revolusi kerakjatan untuk melanggengkan kekuasaan.

Saudara² sekalian, sungguh, berlaku adil dan djudjur adalah salahsatu sumber kewibawaan jang paling sempurna, jang tidak akan tergojah- kan oleh tantangan dan tentangan.

Saudara² sekalian, itulah tempat dan fungsi daripada Saudara². Djuga dalam hubungannja dengan masalah kebidjaksanaan pertahanan dan keamanan.

Dengan tempat dan fungsi itu, Saudara² dapat berbuat banjak sekali mengamalkan Ama- nat Penderitaan Rakjat, chususnja di bidang kebidjaksanaan pertahanan dan keamanan, bagi- an dari program pemerintahan, dimana program pemerintah itu adalah merupakan bagian dari pada program umum revolusi.

Saudara² sekalian, demikianlah keterangan kami untuk Saudara² sekalian. Semoga memba- wa manfaat bagi Amanat Penderitaan Rakjat; rakjat jang Saudara² wakili.

Atas kepertjajaan Saudara² jang terhormat, dan atas kesabaran Saudara² seluruhnja, kami mengutjapkan terimakasih dengan iringan per- mintaan maaf apabila masih banjak kekurangan didalam kami memberikan keterangan² jang un- tuk pertamakalinja ini.

Terimakasih.

BIDANG LEMBAGA - LEMBAGA POLITIK

Disampaikan oleh Waperdam Bidang Lembaga-Lembaga Politik — Dr H. ROESLAN ABDOELGANI didepan Sidang D.P.R.-G.R. pada tanggal 4 Mei 1966.

Jang Mulia Saudara Ketua,
Para anggauta sekalian,

Dalam giliran sekarang ini, maka perkenankanlah saja memberikan keterangan² jang menjangkut beberapa segi bidang lembaga² politik; dengan harapan semoga kepada DPR dapat diberikan beberapa gambaran tentang situasi negara kita dewasa ini dan kebidjaksanaan Kabinet dalam menghadapi dan menanggulangi beberapa persoalan jang urgent, sambil membuka lembaran baru dalam kerdjasama antara DPR-GR dan Kabinet sesuai dengan statusnja masing² menurut Undang² Dasar 1945.

Saudara² sekalian,

Dalam rangka struktur dan komposisi kabinet baru, jang disusun atas penilaian isi surat perintah Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi tertanggal 11 Maret 1966 kepada Men/Pangad Letdjen. Soeharto tentang apa jang dikatakan kestabilan djalannja pemerintahan dan revolusi, maka Waperdam bidang Lembaga² Politik mengkoordinir dan mengendalikan suatu echelon jang terdiri dari :

- a. Front Nasional,
- b. Lembaga Pertahanan Nasional,
- c. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
- d. Badan Tenaga Atom Nasional,
- e. Lembaga Research Nasional, dan
- f. Lembaga Pembina Djiwa Revolusi/LPKB.

Setjara umum dapat diterangkan disini, bahwa perkataan Lembaga adalah suatu "verzamelnaam", suatu kata penghimpun, jang mentjakup didalamnja kata "front" dan kata "badan". Perkataan "front" atau "badan" bukan suatu jang bertentangan dengan kata penghimpun "Lembaga Politik" jang digunakan untuk echelon ini. Sedangkan jang dimaksud dengan istilah politik, adalah Manifesto politik, sebagai pemantjarannja Pantjasila; dan sekali² bukan istilah politik dalam artikata perebutan kekuasaan untuk kepentingan sesuatu golongan.

Berbeda dengan Lembaga² Negara Tertinggi seperti M.P.R., D.P.A., B.P.K. dan D.P.R. jang ditentukan dalam Undang² Dasar; dan berbeda pula dengan Kementerian² jang mengurus suatu bagian tertentu daripada keseluruhan tugas Ne-



gara dan Pemerintah, maka Lembaga² politik adalah merupakan suatu "agency" jang efektif dan efisien, jang bertanggung jawab terhadap pemerintah. Masing² dikepalai dan dipimpin oleh seorang pejabat berkedudukan Menteri.

Front Nasional umpamanya, sebagai tempat penggalangan semua kekuatan Nasional jang progresif-revolusioner bertugas mendjelmakan "social participation" melalui "social backing and support" dan "social control" terhadap segala usaha Kementerian².

Lembaga Pertahanan Nasional, sebagai tempat persiapan/penggalangan tenaga pembina pertahanan pada tingkat nasional dan pertahanan dalam arti jang luas, jaitu ketahanan di bidang politik-ideologis, ketahanan di bidang sosial-ekonomis dan ketahanan di bidang militair-fisik kesemuannya atas landasan berdikarinja geo-politik Indonesia, memerlukan integrasi serta kerdjasama jang sebuliat-bulatnja dalam pembinaan

unsur² kekuatan dan potensi yang terdapat dalam masyarakat dan disemua Kementerian².

Badan Tenaga Atom Nasional, yang menampung kegiatan² di bidang bahan² tenaga atom, survey geologi/eksplorasi, pengembangan reaktor dan instrumentasi nuklir, isotop dan lain² kegiatan di bidang tenaga atom, yang dalam "atomic evolution" daripada dunia dewasa ini mempunyai segi² keamanan, keselamatan dan kesehatan yang penting bagi penyelesaian Revolusi kita; dengan projek²nja Gama di Djokja, Triga di Bandung, projek IRT-2000 di Serpong, Projek bahan² tenaga atom dan Laboratorium Isotop di dasar Djum'at dan sebagainya; kesemuanya ini menjangkut pula aktivita² dari banjak Kementerian².

audara Ketua,

Tak perlu kiranja dinjatakan disini, bahwa juga Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional atau BAPPENAS, Lembaga Research Nasional dan Lembaga Pembina Djiwa Revolusi/PKB mempunyai aktivita² yang menjangkut dan meresap keseluruh Kementerian².

Pada hari ini saja akan membatasi kepada kerangan² sekitar Lembaga Research Nasional dan Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa.

Fungsi Research National dalam Revolusi.

Research Nasional merupakan suatu medan kegiatan dan tanggungjawab daripada semua segi hidup dan peri-kehidupan Manusia Indonesia Baru dalam membangun Masyarakat Sosial Indonesia berdasarkan Pantjasila.

Dalam arti Ilmijah, "research" merupakan suatu rangkaian usaha ilmijah yang sangat erat dengan pembangunannya, mulai dari research dasar sampai da research terpakai dan pembangunan (basic, applied — and development research).

Rangkaian usaha tersebut adalah suatu kesatuan usaha ilmijah. Sifat „nasional" menunjukkan bahwa research nasional harus "problem oriented" dan ditunjukkan setjara spesifik kepada pembeban Amanat Penderitaan Rakyat.

Setjara operasional maka research nasional berkewajiban bertanggungjawab untuk senantiasa dapat memberikan petunjuk-petunjuk (guidance) yang setepat-setepatnja mengenai proses perwujudan daripada Trikerangka Tujuan Revolusi kita.

Pada hakekatnja pelaksanaan tugas Lembaga Research Nasional senantiasa merupakan refleksi daripada usaha nasional dalam keseluruhannja.

Sesuai dengan Instruksi PJM Presiden, maka lembaga ini bertugas untuk "mengkoordinir, memstimulir dan mengadakan research untuk ketetapan dan pembangunan Negara, baik dibidang ilmu² pengetahuan semesta alam, maupun dibidang ilmu² pengetahuan sosial dan kemanusiaan dengan memberikan priorita kepada research di bidang produksi". Perumusan tugas

yang tepat dan singkat ini tidak sadja mempunyai arti teknis-ilmiah, tetapi sekaligus memberi petunjuk² politis dan operasional bagi peranan research.

Garis² besar kebidjaksanaan Research Nasional.

Kebidjaksanaan Research Nasional pada umumnya bergerak di tiga bidang kegiatan yang terarah.

Pertama, ialah mengarahkan potensi Research Nasional dalam usaha menggali, menjempurnakan dan mentrapkan warisan² nenekmojang kita, baik yang meliputi marta (demensi) alamiah maupun marta batiniah. Research di bidang ini harus dapat dijadikan salahsatu landasan demi terbentuknja kesatuan dan persatuan Nasional yang kokoh dan terbinanja kepribadian Nasional.

Kedua, adalah mengusahakan research dan mengaplikasikan hasil²nja bagi terwujudnja prinsip "berdikari" untuk memelihara ketahanan nasional yang optimal.

Ketiganja, segala usaha research haruslah diarahkan kepada memberi landasan yang sehat bagi pembangunan dan pembinaan nasional.

Chususnja dalam rangka pelaksanaan Statement Politik Ekonomi Dalam Negeri oleh Waperdam Ekubang Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada tanggal 12 April 1966 telah diadakan penindjauan kembali dan mengiramakan segala kegiatan Lembaga Research Nasional pada umumnya dan usaha/projek² research pada khususnya dengan statement politik tersebut. Jaitu, mengadakan suatu "tuning in" daripada usaha/kegiatan research nasional didalam irama daripada lagu Revolusi kita. Dalam statement ekonomi tersebut diberikan suatu response berupa suatu kebidjaksanaan ekonomi terhadap tuntutan ketiga daripada Tri-Tuntutan Rakyat. Dari statement politik ekonomi tersebut terlihat dengan djelas adanya peralihan dari alam-maja ke alam-njata.

Mengingat, bahwa dalam arti yang luas penentuan harga tergantung pada inter-aksi antara penawaran (supply) dan permintaan (demand) yang terutama mengandung faktor produksi, penjaluran dan kebiasaan² (habits/preference) daripada para konsumen, maka sifat research Nasional haruslah :

- business oriented research (research tertudju kepada perusahaan²) ;
- transportation oriented research (research tertudju kepada produksi) ;
- transportation oriented research (research tertudju kepada transpor) ;
- administration oriented research (research tertudju kepada administrasi).

Kebidjaksanaan urgensi dan djangka pendek tersebut didasarkan pada kenjataan, bahwa masalah harga (inflasi) yang ada di Indonesia sekarang ini disebabkan karena kurangnya produksi, ja karena adanya mismanagement, meluasnja birokrasi, rusak dan kurangnya infrastruktur,

penjелеwengan², dlsb. lagi. Karena itu maka lain daripada kebidjaksanaan research nasional dalam masa jang lampau, dalam mana terlalu diutamakan dulu itu usaha² research jang hanja berorientasi pada ilmu pengetahuan, maka research nasional pada saat ini harus berthema : "Mengabdikan segala aktivitanja kepada pemertjahan masalah² jang mendesak di bidang pembangunan ekonomi umumnja, sandang-pangan chususnja".

Usaha² operasionil

Didjiwai dan terdorong oleh garis² besar kebidjaksanaan tersebut diatas, maka dalam tahun 1966 ini telah dan akan dilaksanakan usaha/kegiatan² research, terutama dibidang pertanian dan berbagai djenis padi dan bibit-bibit lain, bidang ilmu² laut ; bidang industri dan tehnologi ; bidang geologi dan pertambangan, bidang kesehatan dan obat²an dengan mengerahkan dan mengintensifkan aktivita Lembaga Kimia Nasional, Lembaga Fisika Nasional, Lembaga Elektronika Nasional dan Lembaga Biologi Nasional.

Demikianlah fungsi, kebidjaksanaan serta usaha² operasionil dari Lembaga Research Nasional.

Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB)

Saudara Ketua,

Para Anggauta jang terhormat, saja sekarang datang kepada masalah LPKB.

LPKB atau Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa sekarang ini adalah sebenarnja materialisasi daripada tjita² Assimilasi, seperti jang telah ditjetuskan pada tanggal 24 Maret 1960 di Djakarta dalam "Statement Assimilasi" oleh 10 tokoh² jang berdjiwa muda dari bekas minorita, jang dengan tegas berpendirian : masalah minorita hanjalah dapat diselesaikan dengan djalan assimilasi disegala lapangan setjara aktif dan bebas ; sedjalan dengan djiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

"Statement Assimilasi" ini kemudian pada tanggal 15 Djanuari 1961 — lima tahun jang dulu ditingkatkan oleh Seminar Kesadaran Nasional di Bandungan Ambarawa (Djawa Tengah) mendjadi "Piagam Assimilasi" jang pada tanggal 15 Djuli 1963 dibenarkan oleh Amanat Pemimpin Besar Revolusi kita Bung Karno dengan kata² sebagai berikut :

1. Dalam amanat saja, Lahirnja Pantjasila, saja telah mengemukakan fikiran² jang mendasari proses "NATION BUILDING", jaitu adanja keinginan bersama untuk membangun djiwa bangsa jang bersatu, persatuan karakter karena persamaan nasib dan patriotisme.
2. Proses „NATION BUILDING" itu terus-menerus memerlukan aktivita jang dinamis, pemupukan mental dan djiwa jang ingin bersatu, persamaan watak dasar persamaan nasib, patriotisme, rasa setiakawan dan rasa loyal terhadap Tanahair Indonesia.

Siapa jang tidak berdiri diatas landas „NATION BUILDING" tadi sesungguhnya d hinggapi oleh penjakit "retak dalam djiwa" karena mungkin djiwanja dikuasai oleh loyal ta-kembar atau loyalita-ganda.

3. Saja membenarkan usaha² djiwa muda dalam pembinaan kesatuan Bangsa ini, dengan menghilangkan sikap² dan sifat² menjendralisme (eksklusivisme), dengan djalan penjatuan pembaruan (assimilasi) dalam tubuh Bangsa Indonesia.
4. Saja gandrung akan kesatuan dan persatuan Bangsa Indonesia, saja tidak mau mengembatasan "asli" dan "tidak asli", persukuan serta pementjilan² jang berupa apapun dalam kesatuan Bangsa Indonesia.

Demikian Amanat Pemimpin Besar Revolusi kita Bung Karno tertanggal Bogor, 15 Djuli 1963.

Tiga hari kemudian, jaitu pada tanggal 15 Djuli 1963, dengan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1963 dibentuk LPKB (Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa) jang dimasukkan dalam Kompartimen HURA (Hubungan dengan Rakyat) dan kini bersama² dengan Lembaga Pemuda Djiwa Revolusi dimasukkan dalam echelon Waperdam bidang Lembaga² Politik.

Saudara Ketua, perkenankanlah saja terlebih dahulu mendjelaskan pengertian kata "Kesatuan" dalam rangka "Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa"; dan artikata "Kesatuan" dalam bandingan-perbedaannja dengan kata "Persatuan".

Istilah "persatuan" mengandung arti menyedjajarkan unsur² jang hendak kita persatukan itu, untuk kemudian kita ikat dalam suatu platform bersama jang disetudjui oleh unsur² masing² tersebut, sehingga unsur² kekuasaannya melainkan dipersatukan oleh talipersatuan jang kokoh kuat. Dengan demikian, maka istilah persatuan mengandung masih tetap bertahannya unsur masing² laksana didalam suatu proses ilmu alam, jaitu satu natuurkundig proses. Sudah barang tentu unsur² jang hendak diikat dalam ikatan persatuan itu tidak boleh mengandung sifat² jang antagonistis, jang merusak satu sama lain.

Adapun istilah "kesatuan" mengandung arti mengintegrasikan, mengassimilasikan, membangun atau mensinteseikan unsur² tersebut ibarat dalam satu proses kimia, jaitu satu scheikundig proses. Didalam proses demikian, maka unsur² bagiannja menghilang (fail away) dan tumbuhlah sesuatu jang samasekali baru dan jang kwalitatif serta kwantitatif merupakan suatu "bergere optrekking", suatu sublimasi daripada unsur² bagiannja masing².

Apabila kita berbitjara tentang Persatuan Bangsa, maka saja mengartikan istilah ini sebagai suatu taraf pertama, jaitu mensedjajarkan serta mengikat didalam tali persatuan jang k

kekuatan segala unsur² kesukuan, kedaerahan dan unsur-unsur aliran ideologi politik dalam satu barisan kekuatan Rakjat yang menjala² dengan jiwa anti-feodalisme, anti-nekolim dan jiwa pro-kemerdekaan serta pro-Sosialisme dan, kesemuanya hanya bisa dapat berdiri atas dasar Pantjasila.

Sudah barang tentu dalam meningkatkan taraf pertama menjadi kedua, kita tidak boleh dan tidak dapat main paksaan atau main sekali pukul terus jadi, melainkan harus kita gunakan kebidaksanaan yang sebesar-besarnya atas dasar kesadaran yang mendalam akan mutlaknja Persatuan dan Kesatuan Bangsa oleh unsur masing². Ini tidak berarti, bahwa kita tidak boleh menggunakan unsur terpinin didalam proses yang mahahebat ini. Tidak. Melainkan kita semua harus tetap menjuburkan unsur² terarah dan terpinin itu dengan setegas²nya, dan apabila perlu kita harus menggunakan didalam proses tersebut satu katalisator untuk mempertajam proses tersebut. LPKB adalah sematjam satu katalisator yang mempertajam dan memimpin proses tersebut. Karena itu aktivitas LPKB ditunjukkan untuk mengikis habis provinsialisme, daerahisme dan minoritisme. Artinya kita mengadakan seluruh Rakjat dan Bangsa kita, terutama pemuda-pemudanya untuk meninggalkan pandangan yang sempit, yang ditimbulkan karena terlalu terpukau kepada provinsinya, daerah asalnya atau kepada sukunja.

Sebaliknya kita mengadakan seluruh Rakjat dan Bangsa kita untuk melihat Tanahair kita dari Sabang sampai ke Merauke itu sebagai suatu "Geographical entity", sebagai suatu kesatuan geografis.

Selain itu Tanahair kita dari Sabang sampai Merauke itu juga merupakan suatu :

- a. national unity, suatu kesatuan nasional ;
- b. state entity, suatu kesatuan kenegaraan ; dan
- c. ideological entity, suatu kesatuan ideologi, suatu kebulatan tekad untuk membela dan mempertahankan Ideologi Pantjasila dan akhirnya juga sebagai
- d. entity of social consciousness, satu kesatuan jiwa² kesadaran sosial.

Dan kesemuanya itu harus ditaruhkan atas dasar kesadaran, bahwa Tanahair kita adalah juga suatu socio-economical entity, yaitu suatu kesatuan sosial-ekonomis, dimana kemajuan dan perkembangan ekonomi dan sosial dari daerah dan propinsi masing² tidak mungkin dapat berkembang baik, kalau tidak dalam rangka kesatuannya seluruh daerah tanahair kita, dari Sabang sampai Merauke, selaku suatu kesatuan socio-ekonomis yang harus bantu-membantu, saling mengkomplementir dan harus bergotong-rojong antar daerah ; ini tegas dikeluarkan dan dinyatakan sekarang dengan persesuaian dengan Statement Waperdam bidang Ekubang pada tanggal 12 April 1966.

Ditinjau daripada usaha pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, maka di beberapa daerah kita mengalami berbagai² kesulitan dimasa lampau, yang menghambat persatuan dan kesatuan itu atas dasar Pantjasila kita.

Di Atjeh, Djawa Barat, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan umpamanya, kita pernah mengalami fanatismenja DI/TII yang tidak menghendaki persatuan dan kesatuannya Pantjasila. Di Indonesia Timur pernah pula kita menghadapi aksi²nya sisa-sisa kolonialisme dan feodalisme dalam bentuk pemberontakannya Andi Azis dan RMS, yang tidak sedikit mengganggu persatuan dan kesatuan Bangsa, persatuan dan kesatuan Tanahair dan Negara. Sedangkan dalam tahun 1956/1957/1958 timbullah PRRI/PERMESTA, yang merupakan antjaman yang sangat berbahaya terhadap keutuhan Negara dan Tanahair.

Di Djawa Timur dan Djawa Tengah kita pernah mengalami peruntjangan serta pemberontakannya linksradikalisme PKI, yang baru² ini didalam bentuk Gestapu/PKI menjakup daerah² yang lebih luas lagi daripada tahun 1948 dulu itu. Inipun merupakan rongrongan dan penghianatan terhadap persatuan dan kesatuannya Pantjasila kita.

Kesemuanya itu tidak boleh kita lupakan didalam usaha pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa. Dan kita harus pandai mengambil pelajaran² dari segala kejadian² diatas, agar supaya kita dapat meningkatkan terus usaha-raksasa di bidang "nation and character building" ini. Demikian situasi dan kondisi yang menjangkut masalah, bagaimana situasi di beberapa daerah² di Indonesia di djaman yang lampau dan kondisi bekas minorita didalam rangka nation and character building ini ?

Didalam susunan masyarakat kolonial Hindia Belanda dulu, maka yang menonjol adalah tiga golongan minorita. Pertama adalah golongan Arab, atau lebih tepat orang² kelahiran di Indonesia turunan Arab ; yang kedua adalah keturunan Eropa umumnya, Belanda khususnya, dan ketiga turunan Tionghoa.

Dewasa ini golongan suku Arab boleh dikatakan telah menghilang, telah memburukkan diri dengan rakjat Indonesia. Proses pembauran itu dipertajam karena persamaan agama pada umumnya antara golongan Arab dengan Rakjat Indonesia ; juga karena djumlahnja ketjil, dan karena dewasa ini Negara asalnya, yaitu Hadramaut dan Arabia Saudi tidak memainkan peranan yang sangat besar di dalam kehidupan dunia internasional.

Bagaimana dengan golongan keturunan Belanda ?

Adapun golongan keturunan Belanda kebanyakan telah meninggalkan Indonesia, kembali ke Negeri Belanda. Yang masih tinggal merupakan djumlah yang tak berarti. Ditambah karena negeri Belanda tidak memainkan peranan yang be-

sar di kehidupan dunia internasional, maka boleh dikata suku inipun tidak merupakan soal lagi.

Tetapi golongan suku keturunan Tionghoa adalah golongan yang tetap merupakan suatu masalah yang meminta perhatian dan kewaspadaan kita sepenuhnya. Tidak saja karena jumlahnya besar, tetapi karena leluhurnya terpetjah antara Peking dan Taiwan, sedangkan Peking dewasa ini dengan ideologi Marxisme-Leninisme yang dogmatis, atau "the thought of Mao Tse Tung", yang ajaran-nya Mao Tse Tung memainkan suatu peranan internasional yang sangat mengedjutkan sekali, tidak hanya negara-negara barat, tetapi juga bagi USSR, dan negara-negara Eropa Timur dan menggontjangkan pula hubungannya dengan negara Asia-Afrika.

Dalam pada itu, Saudara-nya sekalian, fakta ini, bahwa negara leluhurnya memainkan suatu peranan yang besar, fakta ini menimbulkan pula sematjam kekaguman di sementara golongan suku keturunan Tionghoa, sehingga menimbulkan "loyalita-ganda", yang seringkali meningkat menjadi eksklusivisme dan rasialisme. Sebenarnya rasialisme dan eksklusivisme adalah anak-kembar dari suatu keretakan jiwa di beberapa golongan suku keturunan Tionghoa akibat daripada perkembangan politik-ideologis di negara leluhurnya seperti yang saja terangkan diatas.

Dan apabila "keretakan jiwa" ini — dulu pernah menjadi alat perekonomian, "economic tool" daripada kolonialisme Hindia Belanda dan pernah juga menjadi "economic tool" daripada fasisisme Djepang — maka timbullah Baperki-isme, yaitu sikap kedjiwaan yang ingin terus "abadi" tanpa berhenti bermusjawarah tentang kewarganegaraan Indonesia dan tanpa mengambil keputusan permufakatan. Sikap kedjiwaan demikian ini adalah pada hakekatnya ragu menjatukan diri dengan rakjat dan revolusi Indonesia, melainkan dalam "keretakan-jiwa" dan loyalitannya itu mereka lebih berpihak kepada politik negara leluhurnya. Malahan di bidang pendidikan dan pengajaran dijalankan garis-politik tertudju kepada tetap memelihara kesadaran berminorita eksklusif Tionghoa, sambil mengabaikan sama sekali pendidikan agama sebagai unsur-mutlak didalam "nation and character building".

Hal² ini mau tidak mau menimbulkan sematjam "kontra-rasialisme" Dengan sendadja saja menekankan kepada perkataan „sematjam" kontra-rasialisme oleh beberapa golongan rakjat kita terhadap mereka sebab pada hakekatnya itu bukan kontra-rasialisme, dan hal² ini akibatnya ialah menjulitkan atau paling sedikit memperlambat pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Namun demikian ini tidak berarti bahwa kita harus bersikap pasif saja terhadap masalah ini, melainkan kita harus terus madju, sambil menjegah djangan sampai eksklusivisme seperti yang diperlihatkan di zaman Baperki dulu itu terulang lagi. Dalam pada itu kita pun harus menentang

rasialisme, baik rasialisme oleh bekas minorita terhadap majorita, maupun rasialisme oleh majorita terhadap bekas minorita.

Dalam pada itu usaha pokok daripada LPKB dalam hal ini ialah terus menjuburkan dan menajatkan pertjepat proses integrasi dan asimilasi, tanpa paksaan sambil membuang pikiran "satu kali pukul tentu djadi". Integrasi dan asimilasi adalah suatu proses yang harus kita djalankan setjara programatis dan sistimatis, dengan menggunakan katalisator sebagai alat-mempertjepat. Tetapi harus diingat bahwa untuk itu kita tidak boleh memforsirnya, sebab proses integrasi dan asimilasi pun berdjalan menurut hukum-kemasyarakatan yang objektif, dinamis dan dialektis.

Jang penting ialah bahwa didalam proses integrasi dan asimilasi ini kita harus terus berpegang teguh kepada landasan² idiil dan materiil seperti yang sudah tegas tertjerminkan didalam Pantjaskel kita dan didalam Manipol-Usdek kita.

Saudara Ketua, para Anggota yang terhormat demikianlah beberapa garisbesar kebidjaksanaan yang telah ditempuh selama ini oleh LPKB. Tidak sedikit rintangan dan gangguan yang telah dialaminya semasa proloognja Gestok dulu itu. Tetapi pertjaja akan kebenaran dasar Pantjaskel dan garis besar haluan Negara Manipol/Usdek maka LPKB dimasa proloognja Gestok/PKI dapat bertahan terus, dan kini dimasa epiloognja Gestok/PKI insja Allah akan terus meningkatkan aktivitanja demi kekompakan Pangti-ABRR dan Rakjat kita.

Ada satu hal yang memerlukan perhatian kita bersama setjara khusus, yaitu bahwa kegagalan putch atau coupnja Dewan Revolusi dengan Gestok/PKI-nja menempatkan hubungan Republik Rakjat Tiongkok - Indonesia dalam proporsi yang sangat berlainan daripada masa proloognja Gestok. Perobahan proporsi hubungan ini antara lain membuka mata para warganegara Republik Indonesia "keturunan" Tionghoa, bahwa "eksklusivisme keturunan" mengakibatkan mereka dianggap indetik dgn. orang² Tionghoa warganegara Republik Rakjat Tiongkok. Memang eksklusivisme dan rasialisme ala Baperki dan sebagainya telah mengaburkan garis pemisah antara mereka dengan orang² asing warganegara Republik Rakjat Tiongkok.

Berdasarkan perkembangan politik akhir² ini dan mengingat gejala² tersebut diatas, maka dapat dimengerti adanya Appel Siaga dan Kesetiiaan di kalangan mereka sendiri diberbagai tempat dalam bulan yang lalu yang pada pokoknya menginginkan dua hal mengenai kebidjaksanaan Pemerintah, yaitu :

- a. Supaja Pemerintah membantu mereka untuk mempertegas garis pemisah yang tegas antara mereka dan warganegara Republik Rakjat Tiongkok yang jumlahnya sangat besar sekarang ($\pm 1,5$ djuta).

Membantu mereka jang mengadakan garis pemisah antara mereka dengan apa jang disebut „asli”. Mulai disadari bahwa djalan satu²nja untuk ini ialah mengikis habis setiap eksklusivisme-keturunan dan mempertjepat proses pembauran masa Rakjat Indonesia.

audara Ketua dan Anggauta² jang terhormat, Pemerintah menaruh perhatian jang sebesar²-ia atas segala keinginan diatas, dan bersih dari-ada segala xomophobia, jaitu bersih daripada segala penyakit seakan² takut kepada orang asing. Pemerintah sedang mengambil langkah², jaitu :

her-registrasi jang teliti dari semua orang asing di Indonesia didalam waktu jang se-singkat²nja. Sedang diusahakan supaja her-registrasi ini dalam satu bulan dapat selesai.

Pemerintah sedang mengambil langkah² menertibkan keorganisasian bagi semua orang Tionghoa Asing, sehingga hanja ada satu organisasi tunggal bagi mereka dengan pengawasan daripada Pemerintah.

Pemerintah sedang mengambil langkah² menertibkan semua organisasi² jang bersifat eksklusif rasial didalam lingkungan tubuh Bangsa Indonesia, dan menertibkannya itu akan menjederhanakan djumlahnja kalau dapat sampai mendjadi satu dan dibawah pengawasan dan bimbingan LPKB.

Pemerintah sedang mengambil langkah² untuk mengadakan pembatasan² jang sekeras²nja terhadap peranan golongan asing didalam bidang ekonomi, pendidikan, pengadjaran dan kebudayaan, sampai sedang dipikirkan dan akan didjalankan penutupan Sekolah² Asing terutama bagi orang Tionghoa Asing.

Selain itu Pemerintah sedang menindjau kem-ia segala perunding²an, jang mensjaratkan i seorang warganegara asing jang ingin mend-i warganegara Indonesia, untuk meminta su-tidak keberatan dari kedutaannja. Dan ke-

biasaannja Kedutaan tidak mau memberikan surat itu. Djuga sedang ditindjau Peraturan Tjatat-an Sipil jang masih mengadakan perbedaan peng-golongan atas dasar perbedaan ras/keturunan. Tentang hal ini nanti kita akan bermaksud be-kerdjasama jang se-erat²nja didalam penindjauan perundang²an ini dengan DPR-GR.

Disamping itu LPKB bersama² dengan Komando Ganjang Malaysia V akan mengambil tindak-an²; jang kesemuanja itu dimaksud untuk mem-pertjepat "nation and character building" sesuai dengan jiwa integrasi dan asimilasi.

Achirnja, perkenankanlah saja mengachiri keterangan saja ini dengan menghubungkan akti-uita LPKB kepada Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei jang baru lalu. Dan sekalipun su-dah lalu beberapa hari, Hari Pendidikan Nasio-nal 2 Mei ada huoungannja dengan sedjarah per-djuangannja almarhum Ki Hadjar Dewantara, sa-lah seorang penabur benih "nation and character building" jang pertama, jang dengan kawan²nja Dr Douwes Dekker menempuh djalan integrasi dan asimilasi menudju kearah persatuan dan ke-satuan Bangsa Indonesia.

Kini benih² itu sudah tumbuh mendjadi pohon, dan bunganja sedang mekar, mungkin disana-sini sudah berbuah, mungkin ditempat lain mekarnja tertahan oleh eksklusivisme dan rasialisme kon-tra revolusi.

Kewajiban kita bersama jalah tak lain me-mekarkan terus bunga² itu, sambil memperko-koh pohon "nation and character building" kita jang ber-Pantjasila ini, atas bumi kepribadiannja Bangsa Indonesia.

Sekian beberapa keterangan saja, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, semoga Tuhan Jang Maha Kuasa memberkati kita sekalian de-ngan Ridho, Taufik dan Hidajat didalam menger-djakan kewadajiban kita bersama itu.

Terimakasih dan Assalamu'alaikum w.w.

Sambungan Lampiran keterangan Waperdam Ekubang

PENGELUARAN LAIN² LEWAT KREDIT PERBENDAHARAAN (dalam djutaan Rupiah)

abaga Negara Tertinggi: Kopel Per. Dasawarsa KAA I		18.224,—
. Bina Marga: Kopel Prodjaya	15.999,9	
Projek Mewangi	9.163,4	
		25.163,3
. Pengairan Dasar: Kopro Bandjir DCI Djaya		11.999,7
. Djalan Lintas Sumatra: Otorita Djalan Raya L-S		2.999,8
. Kehutanan: Otorita Djalan Raya L-S (projek Kehutanan)		107,9
. Pertanian: Mubes Tani		1.700,—
Penjelenggaraan Keuangan (7E): Kopronef	119.987,6	
P.T. Tavip	126,—	
LKBN. Antara	29,5	
		120.143,1
Djumlah		180.337,8

PERUBAHAN TARIF UANG RETRIBUSI DAN DJAMINAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN SERTA BIAJA ADMINISTRASI GUDANG.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi tanggal 13 April 1966 No. 004/SK/IV/1966, No. 005/SK/IV/1966 dan No. 006/SK/IV/1966, berturut² mengenai tarif² Uang Retribusi perusahaan perdagangan, Uang

Djaminan perusahaan perdagangan serta biaya administrasi gudang/ruangan mulai 1 Djanuari 1966 mengalami perubahan sehingga tarif² tersebut mendjadi sbb. :

a. Tarif uang Retribusi perusahaan perdagangan untuk satu tahun, dalam nilai uang lama :

1. Perusahaan Asing — Rp. 150.000,—
2. Perusahaan Nasional :
 - (a) Perdagangan Luarnegeri/Besar — Rp. 125.000,—
 - (b) Perdagangan Perantara/Djasa — Rp. 100.000,—
 - (c) Perdagangan Pertokoan/Etjeran — Rp. 75.000,—

b. Tabel tarif uang Djaminan perusahaan perdagangan, dalam nilai mata uang lama :

GOLONGAN			OMZET SATU TAHUN			UANG DJAMINAN
I.	dari	Rp.	10.000.000,—	kebawah	Rp.	100.000,—
II.	"	"	10.000.000,—	Rp.	20.000.000,—	300.000,—
III.	"	"	20.000.001,—	"	40.000.000,—	500.000,—
IV.	"	"	40.000.001,—	"	60.000.000,—	1.000.000,—
V.	"	"	60.000.001,—	"	100.000.000,—	1.500.000,—
VI.	"	"	100.000.001,—	"	150.000.000,—	2.500.000,—
VII.	"	"	150.000.001,—	"	200.000.000,—	4.000.000,—
VIII.	"	"	200.000.001,—	"	500.000.000,—	5.000.000,—
IX.	"	"	500.000.001,—	"	1.000.000.000,—	10.000.000,—
X.	"	"	1.000.000.001,—	keatas	"	20.000.000,—

c. Tarif biaya Administrasi Gudang/Ruangan untuk satu tahun, dalam nilai matauang lama :

1. Ruangan Rp. 10.000,—
2. Gudang luas 6 — 25 M2 .. 20.000,—
3. " 25 — 100 M2 .. 75.000,—
4. " 100 — 250 M2 .. 150.000,—
5. " 250 — 500 M2 .. 200.000,—
6. " 500 — 1000 M2 .. 300.000,—
7. " 1000 — 1200 M2 .. 500.000,—
8. " 1200 — dan selebihnja mem-
bajar sebanyak Rp. 500.000,—
ditambah dengan Rp. 100.000,—
tiap kelebihan luas dibulatkan
100 M2.

Tjara² pembayaran uang retribusi, uang djaminan dan biaya administrasi tersebut tetap berlaku seperti biasa jaitu seluruhnja melalui Kantor² Tjabang B.N.I. Unit III setempat, diwilajah/daerah mana perusahaan perdagangan tersebut berada (berdomisili).

Sebagai akibat perusahaan tarif² tersebut jang mulai berlaku surut 1 Djanuari 1966, maka perusahaan perdagangan jang telah membajar uang retribusi/biaya administrasi gudang

untuk tahun 1966 menurut tarif lama terdapat selisih jang belum dibajar oleh pengusaha jang selisih mana harus disetor paling lambat 1 Agustus 1966.

Bagi perusahaan perdagangan jang mendjukan Surat Permohonan Izin (S.P.I.) untuk tahun 1966, berlaku tarif uang djaminan tersebut diatas. Untuk perusahaan² perdagangan termaksud jang telah terlandjur membajar uang Djaminan menurut tabel/ketentuan lama terdapat selisih jang belum dibajar oleh pengusaha jang bersangkutan, selisih mana harus disetor paling lambat 1 Agustus 1966.

Berhubung karena pembayaran retribusi/djaminan adalah salah satu sjarat pokok untuk memperoleh S.P.I. dan biaya administrasi gudang dga mendjadi salah satu sjarat pokok untuk berlakuknja Izin Gudang, diandjurkan agar pembayaran penjetoran selisih tsb. dipenuhi selengkap mungkin.

Pendjelasan² selandjutnja dapat diberifi oleh Perwakilan² Departemen Perdagangan di ibukota Propinsi jbs./DCI Djakarta - Raya/Darah Istimewa Jogjakarta dan Kantor² Tjabang Pengadaan dan Penjaluran di daerah², ditem mana pengusaha jang bersangkutan berada (berdomisili).

AMANAT WAPERDAM HANKAM a.i. MEN/PANGAD LETDJEN. SOEHARTO BERKENAAN DENGAN PENUNDAAN SIDANG MPR(S)

*kemurnian Pelaksanaan UUD 1945 hasrat suara
Hati nurani Rakjat*

Dalam menanggapi perkembangan keadaan
terhubung dengan ditundanya sidang MPRS yang
dijadikannya akan dilangsungkan tgl. 12 Mei 1966
Senajan, Djakarta, oleh Waperdam a.i./Men-
pangad Suharto telah diutjapkan amanat, yang
mengandung sbb. :

Pimpinan Angkatan Bersendjata menganggap
perlu memberikan pertanggungjawaban kepada
Rakjat Indonesia sebagai Ibu Kandung, yang
telah melahirkannya, untuk mengiringi akan
perkembangannya dalam menanggapi perkembangan
keadaan, yang hakekatnya mengandung keadaan
penundaan persidangan Madjelis Permusjawara-
an Rakjat Sementara karena masih diperlukan
usaha kelengkapan penjemputan, setelah di-
pangak oleh akibat petualangan kontra revo-
lusi Gerakan 30 September/PKI. Akan tetapi
penundaan itu, tidaklah mempunyai arti pengem-
baran dari perjuangan mawas diri kita bersama-
nya, dari penjelewengan kita bersama terhadap
kemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar
1955.

Pimpinan Angkatan Bersendjata memahami
dengan saksama, bahwa berlakunya lagi Undang-
undang Dasar itu, oleh karena ia memang se-
ungguhnya sudah berlaku kembali sedjak Dekrit
Presiden tanggal 5 Djuli 1959. Memperlakukan
kembali Undang-undang Dasar itu, seperti yang
dijadikannya enam tahun yang lalu, djuga tidak ber-
memperlakukan kembali aturan peralihannya,
yang menentukan, bahwa kekuasaan Pemerintah
sebenarnya dijalankan oleh Presiden, (hanja)
dengan bantuan Komita Nasional. Oleh karena,
ini menurut ilmu pengetahuan hukum, bah-
wa peraturan peralihan itu daja lakunya hanja
satu kali atau „eenmalig”, jaitu seperti yang terdjadi
pada th. 1945 hingga th. 1950, mendjelang Konsti-
tusi Republik Indonesia Serikat, yang diemohi
Rakjat sendiri, melainkan bukanlah djustru
melainkan „absolutisme” itulah dewasa ini yang
dijadikannya oleh rakjat dalam rangka kita bermawas

Jang mendjadi hasrat suara hati nurani rak-
jat adalah kembali kepada kemurniannya pelak-
sanaan, sekali lagi pelaksanaan daripada Undang-
undang Dasar 1945, yang nota bene telah berlaku
kembali semendjak tahun 1959, akan tetapi yang
dijadikannya pelaksanaan oleh proloog dan
pangognya Gerakan 30 September/PKI, hingga
pada itulah kita perlu mawas diri.

Pernyataan fungsi Angkatan Bersendjata.

Pimpinan Angkatan Bersendjata telah mem-
buka pernyataannya dengan menundjukkan fung-
si Angkatan Bersendjata yang sebagai pengaman
dan pengawal Revolusi Indonesia, dengan tiga
kerangka tudjuannya yang hendak ditjapai, ber-
dasarkan PANTJASILA, sebagaimana telah di-
tunjukkan pula dengan chidmat dalam mukadimah
Undang-undang Dasar 1945, jaitu :

”.....satu negara yang melindungi sege-
nap Bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Da-
rah Indonesia, memadjukan kesedjahteraan
umum, mentjerdaskan kehidupan Bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdu-
sarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan ke-
adilan sosial.....”.

Djuga Angkatan Bersendjata melakukan
pengamanan Pimpinan dan pengamanan kewiba-
waan Pimpinan Revolusi Indonesia, Presiden,
Bung Karno, yang dengan iktikad baik, Angkatan
Bersendjata sebagai anak kandung revolusi be-
rani dan djudjur dalam memberikan laporan dan
pertimbangan kepada Pimpinan Revolusi Indone-
sia untuk tidak sekarang dan tidak untuk nanti,
mengambil keputusan dan kebidjaksanaan yang
kurang tepat, karena tidak mengedjawantahkan
suara hati nurani rakjat.

Kedudukan Presiden

Dalam hubungan dengan pengamanan itulah,
maka seperti yang mendjadi niat iktikad Presi-
den, Bung Karno sendiri dan djuga seperti yang
mendjadi hasrat nurani rakjat, Angkatan Bersen-
djata, anak kandung rakjat, tidak hendak me-
nempatkan Presiden sebagai Kepala Negara me-
nurut perangkat, liberal-Parlementer, tetapi dju-
ga tidak hendak menempatkan Presiden sebagai
seorang Diktator; djuga tidak hendak men-
dongkel² Presiden. Masalah penentuan Presiden,
Bung Karno, sebagai Presiden seumur hidup dan
sebagai Pemimpin Besar Revolusi, sesungguhnya
bukan kehendak Bung Karno sendiri, melainkan
hal itu adalah hasil keputusan Madjelis Permu-
sjawaratan Rakjat Sementara. Lepas daripada
persoalan apakah keputusan itu hasil dari ga-
gasan ”Durna-isme” atau bukan, akan tetapi de-
wasa ini, dalam rangka pengamanan djalannya
revolusi Indonesia selanjutnya dalam rangka
terdjaminnya keamanan dan ketenangan serta ke-
stabilan djalannya pemerintahan, dalam rangka
mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan
pimpinan Presiden, Bung Karno, kita sungguh²
hendak menempatkan menurut hakekat kemur-
nian kedudukan Presiden yang sebenarnya, seba-
gai Pemimpin Rakjat, penjambung lidah rakjat,
menurut azas dan sendi Undang-undang Dasar
1945.

Dalam rangka menanggapi suara hati nurani Rakjat, Ibu Kandung Angkatan Bersendjata, itulah maka Angkatan Bersendjata jang djuga beriktikadkan kepada kemurnian pelaksanaan daripada Undang-undang Dasar 1945, menurut azas dan sendinja, mendukung kebidjaksanaan Presiden, jang mengenai, pertama ditetapkannja Undang-undang Pemilihan Umum berdasarkan kekuasaan bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat, menurut ketentuan dalam pasal-pasal 2 ayat (1) berhubungan dengan pasal-pasal 5 ayat (1) dan 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; kedua, hendak diurnja susunan Dewan Pertimbangan Agung dengan Undang-undang berdasarkan kekuasaan bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat menurut ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) berhubungan dengan pasal-pasal 5 ayat (1) dan 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; ketiga, djuga jang mengenai ditetapkannja susunan sementara Dewan Perwakilan Rakjat (Gotong Rojong), Madjelis Permusjawaratan Rakjat (Sementara) dan Dewan Pertimbangan Agung, sebelum jang tetap, menurut per-Undang-undangan nanti; sekedar sebagai pengisian kehampaan jang ditimbulkan oleh petualangan kontra-revolusi Gerakan 30 September/PKI, tentu sadja dengan sendirinja berdasarkan musjawarah untuk mufakat bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat (Gotong Rojong) dan keempat menempatkan fungsi Madjelis Permusjawaratan Rakjat, meskipun sementara, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat (Gotong Rojong), Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan lain-lain Lembaga, menurut kemurniannja pelaksanaan jang berazas dan bersendikan kepada Undang-undang Dasar 1945.

Saudara² Sekalian,

Dengan berpedoman bahwa : Demokrasi tanpa pimpinan adalah anarki, sedangkan pimpinan tanpa demokrasi adalah diktatur, marilah kita sempurnakan Lembaga² Revolusi kita, baik bentuk-susunannja maupun isi-kerdjanja, menurut kemurnian pelaksanaan azas dan sendi daripada Undang-undang Dasar 1945, jang mendjadi djeritan suara nurani Rakjat.

Karena selama ini kemurnian pelaksanaan azas dan sendi Undang-undang Dasar 1945 itu, memang telah dirusak oleh proloog petualangan Kontra-revolusi Gerakan 30 September/PKI dan oleh "Durna-isme" dalam epiloognja gerakan kontra-revolusi itu.

Demokrasi kita adalah demokrasi terpimpin jang lahir dari Rakjat, karena Rakjat dan untuk Rakjat.

Selanjutnja dapat kami terangkan bahwa Perintah telah memutuskan untuk mengutus misi-teknis ke Djepang dan beberapa negara Eropa Barat dan Timur mengadakan pembitjaraan tentang kemungkinan² "rescheduling" pembay hutang² kita kepada Negara² itu sehingga dapat memberatkan ekonomi Negara kita. Lain dari misi itu misi ini bertugas pula menjari keterangan tentang kemungkinan mendapatkan kredit baru yang sangat diperlukan untuk usaha rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi Negara kita. Apakah hasil dari misi-teknis itu membuka djalan jang baik untuk direntjanakan untuk mengadakan misi-diploma yang akan mengadakan pembitjaraan jang menyangkut tentang "rescheduling" dan tentang mendapat kredit baru itu. Dalam hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat telah didapat kata sepakat bahwa Indonesia tidak perlu mengirim misi itu ke Negara tersebut oleh karena pembitjaraan dapat dilakukan di Djakarta antara Pemerintah Indonesia dengan Duta Besar Amerika Serikat.

Demikianlah beberapa keterangan tentang tindakan² permulaan untuk melaksanakan politik ekonomi jang termuat didalam statement tanggal April 1966. Segaris dengan konsepsi strategi jang diuraikan oleh rekan Wakil Perdana Menteri bidang Pertahanan dan Keamanan Let. Djen. Suharto di depan sidang Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong pada tanggal 4 bulan ini maka diarahkan menjusun dan melaksanakan politik ekonomi pun ada beberapa patokan jang senantiasa dilakukannya jaitu:

1. tjara berfikir jang realistis dan rasionil;
2. sikap untuk mengabdikan pada kepentingan nasional;
3. pengintegrasian antara hubungan ekonomi politik luar negeri sehingga dua-duanja saling menjokong;
4. keserasian antar ekonomi dan politik dalam negeri, dan achirnja.
5. politik ekonomi jang didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 dalam arti jang murni.

Berpedoman pada kelima pokok itu maka Perintah telah menentukan garis² politik ekonomi jang kami uraikan tadi. Untuk pelaksanaannja sudah barang tentu diperlukan sarat² jang djuga terdapat dibidang non-ekonomis, misalnja dibidang politik sosial dan kebudayaan. Faktor² ekonomis dan non-ekonomis itu didalam usaha rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi saling kait-mengait sehingga tidak dapat dipisah²kan satu sama lainnja.

Pada waktu ini masyarakat Indonesia sedang berusaha utk. menjapai suatu stabilisasi politik dan ekonomi baru, hal mana tentu erat hubungannja dengan usaha kita bersama untuk menjiptakan ekonomi jang sehat.

dilandjutkan ke hlm.

**PERNJATAAN ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK
INDONESIA**

Pimpinan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, setelah memahami dengan seksama keadaan, yang mengedjawantah suara hati nurani rakjat, dengan chidmatanggapi dengan pernjataan sebagai berikut :

Angkatan Bersendjata adalah pengaman, pengawal Revolusi Indonesia dan dengan tiga kerangka tudjuannya yang hendak ditjapai, berdasarkan Pantjasila ;

Angkatan Bersendjata adalah pengaman Pimpinan Revolusi Indonesia dan pengaman kewibawaan Presiden Bung Karno, beserta adjarannya, yang dengan iktikad baik, sebagai anak kandung revolusi, berani dan djudjur dalam memberikan laporan dan pertimbangan kepada pimpinan Revolusi Indonesia, untuk menjegah, baik sekarang maupun nanti, dalam mengambil keputusan dan kebidjaksanaan yang kurang tepat, karena tidak mengedjawantakan suara hati nurani rakjat;

Dalam hubungan itu, Angkatan Bersendjata, seperti yang mendjadi niat iktikad Presiden, Bung Karno sendiri, djuga seperti yang mendjadi hasrat suara hati nurani rakjat, hendak menempatkan hakekat kedudukan Presiden yang sebenarnya, menurut kemurniannya azas dan sendi pelaksanaan daripada Undang-undang Dasar 1945 ;

Untuk pemurnian pelaksanaan yang berazas dan bersendikan kepada Undang-Undang Dasar 1945, sebagai pengedjawantahan suara hati nurani rakjat, Angkatan Bersendjata mendukung kebidjaksanaan Presiden, Bung Karno, mengenai :

(a) — rentjana ditetapkannya Undang-undang Pemilihan Umum, berdasarkan kekuasaan bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat (pasal 2 ayat (1), dan pasal 19 ayat (1), berhubung dengan pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD 1945 ;

(b) — rentjana ditetapkannya susunan sementara Dewan Pertimbangan Agung, berdasarkan kekuasaan bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat (pasal 16 ayat (1) berhubung dengan pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

(c) — rentjana ditetapkannya susunan sementara Dewan Perwakilan Rakjat, Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung untuk pengisian kehampaan akibat Gerakan 30 September/PKI berdasarkan musjawarah untuk mufakat dan sepakat bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ;

(d) — penempatan menurut kemurniannya pelaksanaan yang berazas dan bersendikan kepada Undang-undang Dasar 1945, daripada fungsi :

1. Madjelis Permusjawaratan Rakjat (Sementara) ;
2. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat (Gotong-Rojong) ;
3. Dewan Pertimbangan Agung ;
4. Mahkamah Agung ;
5. Badan Pemeriksa Keuangan ;
6. dan lain-lain Lembaga.

Demikianlah, pernjataan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

Djakarta, 5 Mei 1966.

Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan
Keamanan a. i./Menteri/Panglima
Angkatan Darat,

t. t. d

S O E H A R T O

Letnan Djendral T.N.I.

Menteri/Panglima Angkatan Udara,

t. t. d

RUSMIN NURJADIN

Komodor Udara

Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian,

t. t. d

SUTJIPTO JUDODIHARDJO

Komisaris Djenderal Polisi.

Wakil Panglima Besar
Komando Ganjang Malaysia,

t. t. d

DR. A.H. NASUTION

Djenderal T.N.I.

Menteri/Panglima Angkatan Laut,

t. t. d

M O E L J A D I

Laksamana Muda (L)

LARANGAN PEMAKAIAN DEvisa PELENGKAP UNTUK IMPOR KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG TERTENTU

S.K. Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi dan Menteri Keuangan
No. 013/SKB/IV/66 - 046/M. K./66.

MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN MENTERI KEUANGAN

MENIMBANG :

1. bahwa dalam rangka penjederhanaan hidup dan pemakaian devisa yang lebih efisien sebagaimana dimaksud dalam Statement Politik/J.M. Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan tanggal 4 dan 12 April 1966, perlu membatasi pemasukan kendaraan bermotor penumpang tertentu.
2. bahwa karenanjan dipandang perlu diadakan larangan impor kendaraan bermotor tersebut dengan memakai Devisa Pelengkap, sebagai salah satu sumber devisa yang sampai kini baru dipakai untuk tujuan termaksud.

MENINGGAT :

1. Undang - Undang Devisa tahun 1964 No. 32.
2. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1965.
3. Pengumuman B.L.L.D. No. 1/DP/BLLD/65 tanggal 20 Februari 1965 bab 4 ayat 1.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Larangan pemakaian Devisa Pelengkap untuk impor kendaraan bermotor penumpang tertentu sebagai berikut :

Pasal 1.

- (1) Pemakaian Devisa Pelengkap baik yang tertajat dalam rekening D.P.A. atau D.P.B. di Bank Devisa maupun disimpan di Luar Negeri ataupun di Dalam Negeri dengan tjara untuk pengimporan kendaraan bermotor penumpang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibawah ini dilarang.
- (2) diketjualikan daripada ketentuan tersebut diatas pemasukan kendaraan bermotor termaksud yang menurut ketentuan Peraturan Bea dan Tjukai dibebaskan dari pembajakan bea masuk karena termasuk barang pindahan.

Pasal 2.

Jang dimaksud dengan kendaraan bermotor penumpang tertentu dalam surat Keputusan ini sama ini adalah semua kendaraan bermotor jang termasuk Tarip Pos :

- 834. I. a. 4. bb
- 834. I. a. 4. cc
- 834. I. b. 4. aa
- 834. I. b. 4. bb

Pasal 3.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan penjitaan kendaraan bermotor bersangkutan disamping tindakan-tindakan administratif lainnja.

Pasal 4.

Ketentuan ini mulai berlaku terhadap kendaraan bermotor jang diberangkatkan dari Luar Negeri denngan Bill of Lading jang bertanggal satu bulan sesudah tanggal ditetapkannja Surat Keputusan Bersama ini.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tgl. : 26 April 1966

MENTERI KEUANGAN

MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI

t. t. d.

t. t. d.

(Soemarno S.H.)

(D. ASHARI)

Maj. Djen. TNI

KEGIATAN BUKARET DIBEKUKAN

Dengan Keputusan Perdana Menteri R.I. No. 17/PM/1966 tanggal 18 April 1966 telah ditetapkan pembekuan semua kegiatan Badan Urusan Karet Rakjat (BUKARET). Semua persoalan² dan tugas² Badan Urusan Karet Rakjat (BUKARET) dikembalikan pada Kementerian²/Departemen² yang bersangkutan. Pengaturan selanjutnya mengenai pelaksanaan pembekuan tersebut dilakukan oleh Menteri Pertanian.

Keputusan Perdana Menteri R.I. ini yang diundatangani oleh Waperdam bidang Ekubangri Sultan Hamengkubuwono IX, adalah dalam rangka struktur dan tatajara kerdja Kabinet yang dikembalikan lagi, dalam mana kesederhanaan dalam prosedur maupun dalam organisasi merupakan keharusan mutlak, segala persoalan dan tugas serta tanggungjawab BUKARET dapat ditampung seluruhnya oleh Kementerian² yang bersangkutan; dan untuk menetapkan kesatuan tindak dalam pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan persoalan karet rakjat.

Dalam Pendjelasan Keputusan Perdana Menteri R.I. No. 17/PM/1966 tsb. dijelaskan, bahwa BUKARET didirikan dengan Peraturan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 15 Tahun 1963, tanggal 22 Djuni 1963, dan tugasnya adalah merumuskan kebidjaksanaan Pemerintah mengenai masalah karet yang dilandaskan pada strategi Dasar Ekonomi Indonesia yang ditetapkan dalam Deklarasi Ekonomi tanggal 28 Maret 1963. Setjara terperintji tugas tersebut tertjermin dalam tugas BUKARET Paripurna yang termuat dalam pasal 3 Penpres tersebut diatas yang beris sebagai berikut :

"Tugas BUKARET Paripurna ialah menetapkan dasar² kebidjaksanaan Pemerintah mengenai masalah karet rakjat dan menggariskan ketentuan² pokok pelaksanaannya yang mempunyai tujuan :

memperbesar produksi dengan usaha peremajaan, perluasan dan perbaikan tanaman pokok karet ;

- b. mempertinggi nilai barang dengan usaha standarisasi mutu, berat timbangan dan pengepakan ;
- c. mengadakan penelitian dan tindakan² guna mentjapai perbaikan pemasaran ekspor karet ;
- d. melindungi kepentingan dan mempertinggi tingkat hidup para petani karet dengan usaha pengembangan perkoperasian ;
- e. memajukan usaha² penelitian dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah karet rakjat.

Tugas² tersebut setjara keseluruhan sudah merupakan tugas daripada Kementerian² (dahulu Departemen²) yang bersangkutan dengan materi persoalannya sendiri.

Dalam rangka penjederhanaan yang merupakan program penting Pemerintah sekarang, baik penjederhanaannya dalam prosedur maupun dalam organisasi, tindakan pertama yang harus diambil ialah, menghilangkan segala matjam doubleures (satu persoalan yang sama diurus oleh lebih dari satu instansi) dalam bidang Pemerintahan sambil sekaligus mengembalikan semua persoalan dalam proporsi yang sebenarnya dengan tujuan mengembalikan kewibawaan Pemerintah beserta instansi²nya dalam mengurus kepentingan rakjat banjak.

Sehubungan dengan itu maka dipandang perlu untuk membekukan kegiatan BUKARET yang seperti disebutkan diatas setjara keseluruhan dapat ditampung oleh Kementerian² yang bersangkutan dengan materi persoalannya sendiri.

Dalam pada itu sehubungan dengan pembekuan itu perlu ditunjuk seorang Menteri yang ditugaskan menampung pelaksanaan daripada pembekuan tersebut terutama mengadakan inventarisasi yang perlu dan memikirkan kebidjaksanaan selanjutnya mengenai pelaksanaan tugas BUKARET oleh instansi² Kementerian yang bersangkutan.

Demikian pendjelasan Keputusan Perdana Menteri No. 17/PM/1966 tentang pembekuan semua kegiatan BUKARET yang mulai berlaku sejak tanggal 18 April 1966.

Politik Luar Negeri Sambungan hal. 19.

Sekianlah pernyataan saja mengenai kebidjaksanaan politik luar negeri yang didjalankan oleh pemerintah. Moga² keterangan² yang saja beris malam ini dapat menanam pengertian seperjaya mengenai politik luar negeri Pemerintah.

Sebagai penutup saja mengutjapkan terima kasih banjak kepada sidang yang terhormat yang telah memberi waktu dan kesempatan kepada saya untuk memberikan keterangan mengenai kebidjaksanaan politik luar negeri Pemerintah.

Assalamu'alaikum w.w.

Waperdam Ekubang Sambungan hal. 32.

Sebagai penutup kata maka Pemerintah mengutjapkan kepertjajaan bahwa dgn. bantuan yang rela dari rakjat serta kerdja sama yang baik dengan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong program rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi itu dapat didjalankan seperti kita inginkan bersama.

Sekian dan terima kasih.

Hamengkubuwono IX.

Variaberita Nusantara

SUMATRA UTARA

RAKJAT KARO SIAP TANAM DJARAK

Rakjat Karo sudah siap sedia menanam djarak sebagai memenuhi andjuran pemerintah dalam rangka berdikari. Tanah untuk itu sudah tersedia, tapi sajangnja bibit djarak belum djuga kunjung tiba. Demikian dikatakan oleh Bupati Karo pada achir Maret j.l.

PABRIK RAMI SIANTAR

Satu2nja pabrik rami di Sumatra Utara terdapat di Pematangsiantar, kini tjuma dapat bekerdja dengan kapasita 25 persen, berhubung sulitnja diperoleh bahan bakunja. Serat rami jang selama ini didatangkan dari luar negeri, semendjak 1963 pemasukkannya tidak ada lagi. Bahan baku asal dalam negeri sukar diperoleh dan tak mentjukupi. Pimpinan PT Rami Siantar dalam laporannya kepada Gubernur Sumut mengharapakan pemerintah untuk membuka tanah buat perkebunan rami disekitar Sinaksak jang selain letaknya dekat dengan pabrik djuga keadaan tanahnya serasi buat tanaman rami.

PRODUKSI PERKEBUNAN AKAN DIEKSPOR SENDIRI

Gubernur KDH Sumut telah memutuskan untuk mengeksport sendiri produksi2 dari perkebunan2 milik perusahaan daerah dan uang sudah tersedia.

* * *

DJAMBI

BIDANG SANDANG

Untuk projek sandang di Djambi telah disediakan tanah 3.800 hektar untuk digunakan penanaman kapas 1800 hektar dan penanaman murbei seluas 2000 hektar. Diharapkan projek tersebut dan diharapkan agar pemerintah dengan segera merealisirnja.

**

SUMATRA SELATAN

SUMUR BARU DI PRABUMULIH

Sumur minyak Belimbing 4 didaerah eksplorasi Prabumulih pada achir Maret j.l. telah berhasil mengeluarkan produksinya jang pertama setelah untuk beberapa waktu dilakukan pengeboran2 jang saksama. Ini adalah sumur minyak jang pertama dalam kompleks perminjakan di Prabumulih jang dikerdjakan seluruhnya oleh tenaga2 bangsa Indonesia, setelah PT Shell Indonesia diserahkan kepada Pemerintah pada permulaan tahun 1966 ini.

DAERAH PASEMAH LAHAT DAERAH PENGHASIL KOPI

Daerah Pasemah jang masuk Kabupaten Lahat adalah penghasil kopi jang terbanjak dan terdidat di daerah Sumatra Selatan. Untuk tahun 1966 perkiraan hasil panen kopi daerah Pasemah akan mentjapai 21.000 ton. Dalam konperasi2 kopi dan pantjatangan Lahat telah dibahas a.l. mengenai perkoperasian, meninggikan hasil produksi tanaman kopi serta masalah djalan2 di daerah itu, terutama djalan2 dimasyarakat tempat penghasil kopi itu sekarang hampir semuanya tak dapat dilalui kendaraan bermotor (mobil). Para petani setjara beranting harus berdjalan ke kota untuk mendjual hasil buminya, dengan melalui djalan pintas hutan belukar ke kota Lahat Pagaralam. Malah ada daerah jang masuk Kabupaten Lahat, tetapi karena susah untuk mentjapai kota tersebut, terpaksa mendjual hasil kopi ke kota Tjurup.

**

LAMPUNG

Daerah Propinsi Lampung mempunjai banjak kali kota pelabuhan jang mengelilingi sepanjang daerah pantai daerah itu, sehingga perhubungan lalulintas laut merupakan uratnadi terpenting berkelantjaran roda perekonomian. Mengenai perhubungan darat banjak djalan2 jang sudah sedekian rusaknja, terutama djalan2 di daerah Selatan. Oleh sebab itu tugas pokok pemerintah propinsi Lampung adalah merehabilitir perhubungan darat dan laut dan jang lebih penting lagi ialah meninggikan produksi pangan. Demikian a.l. Wakil Gubernur Propinsi Lampung Nadirsjah MA.

PELABUHAN KRUI

Djauh sebelum muntjul pelabuhan Pandjangan pelabuhan ekspor terkemuka didaerah itu ialah Krui dan Menggala; tetapi setelah djaringan kereta api menghubungkan Tandjungkarang dan Kotabaru tidak dipergunakan lagi sebagai pelabuhan ekspor. Menurut rentjana Pemerintah propinsi Lampung pelabuhan2 tersebut akan diperbaiki dan akan djadikan pelabuhan alam: pelabuhan Krui untuk Lampung Utara, pelabuhan Menggala untuk Lampung Tengah demi untuk memperbesar kapasitas pelabuhan Pandjangan untuk Lampung Selatan.

MEMBANGUN DJEMBATAN BESAR DENGAN MODAL 250 TON PADI

Oleh penduduk Way Kibang Ketjamatan Way Sekampung Kabupaten Lampung Tengah telah dapat kata sepakat untuk membangun sebuah djembatan besar di Ketjamatan Way Sekampung, jang

modalkan sedjumlah 250 ton padi seharga Rp. ...
juta yang didapat setjara gotongrojong dika-
ngan masyarakat petani. Setiap keluarga mem-
ikan satu kwintal padi terdiri dari 2500 kepala
uarga yang ada di ketjamatan itu.

EKSPOR DJAGUNG DAN GAPLEK 1966

Pemerintah daerah Lampung dalam tahun 1966
akan mengekspor djagung sedjumlah 20.000 ton
Djepang dan Eropa. Disamping itu akan dieks-
pula gaplek sebanyak 25.000 ton ke Djerman
at dan Negeri Belanda. Ekspor tersebut adalah
persetudjuon Pemerintah Pusat jaitu agar
erintah Propinsi Lampung mengekspor bahan2
ah dalam rangka pemasukan devisa untuk mem-
gun daerah. Usaha ekspor bahan2 lemah yang
h dilaksanakan dalam tahun 1965 adalah 7500
djagung dan 10.000 ton gaplek ke Asia dan
pa. Demikian Ketua BPUP Propinsi Lampung
rapto.

Untuk ini diharapkan, agar petani hendaknja
p memelihara dan mempertinggi mutu bahan2
ebut, dimana oleh BPUP akan diberikan tun-
n2 guna mempertahankan mutu yang sebaik2-

PANEN TENGAH DALAM PANEN 1965/1966

dalam tahun tanaman 1965/1966 daerah Kabupa-
Lampung Tengah berhasil memproduksi sedjum-
59.750 ton padi dari seluas sawah 14.915 hek-
Produksi djagung mentjapai 29.500 ton dan
aju (singkong) 256.000 ton. Untuk mengolah
n2 pangan didaerah tsb., hingga kini memiliki
ah pabrik gilingan padi, 95 hulder dan 61
k tapioca.

PRODUKSI ikan darat Kabupaten Lampung
ah dalam tahun 1965 sedjumlah 154,27 ton
berbagai djenis yang meliputi 2.203.250 ekor.
aksi ikan yang telah ditjapai itu adalah hasil
ikan kolam seluas 215,15 hektar, ikan sawah
s 288,14 hektar dan ikan tebat seluas 240
r.

lain ikan kolam, sawah dan tebat, didaerah
ung Tengah terdapat pula perikanan diper-
umum dan rawa2 sekitar tempat2 tersebut
menghasilkan puluhan ton ikan setiap tahun-

**

**

SULAWESI UTARA

INSTRUKSI PANGDAM XIII/MERDEKA

Dalam rangka penertiban khusus dilindungi
Kodam XIII/Merdeka Brigdjen Soedarmono dalam
instruksinja baru2 ini telah mengeluarkan keten-
tuan bahwa setiap anggota Angkatan Darat dalam
slagorde KODAM XIII/Merdeka dilarang melaku-
kan atau harus menghentikan segala kegiatan da-
lam masalah perkopraan, tjengkeh pala dll. Sehu-
bungan dengan itu pula Panglima menghendaki
agar supaja setiap usaha yang menjangkut kese-
djahteraan anggota kesatuan, hanja dilaksanakan
setelah memperoleh restu dan izin langsung dari
Panglima Brigdjen Soedarmono.

**

NUSATENGARA

SUMBAWA KEBANDJIRAN DJAGUNG

Pada bulan2 terachir ini di Kabupaten Sumbawa
(Nusatenggara Barat), oleh kaum tani sedang di-
lakukan panen djagung, sehingga bahan pangan
tersebut melimpah2. Tanaman djagung rakjat ta-
hun ini sangat mendjadi2, berhubung iklim dan
waktu penanamannja sangat tjotjok sekali. Dengan
adanja panen djagung yang melimpah2 itu, pendu-
duk tidaklagi memperhatikan harga beras yang be-
gitu tinggi, karena kebiasaan penduduk Sumbawa
sedjak zaman dahulu ialah makan djagung sebagai
pangan sehari2 disamping beras. Harga djagung di
Sumbawa Rp. 1500 uang lama per kg, sedangkan
beras Rp. 4000,— (ul) per kg.

Katjang idjo Sumbawa

Salahsatu hasilbumi Kabupaten Sumbawa jaitu
katjang idjo yang pada tahun 1965 jl. telah mengi-
rimkan keluar daerah sedjumlah 3.000 ton. Katjang
idjo Sumbawa belum mentjapai kwalita ekspor;
tetapi katjang idjo tersebut lebih disukai oleh pen-
duduk dibeberapa tempat di pulau Djawa, terutama
pihak ALRI di Surabaya, yang sering memesannja.

C.V. DJAWA - SUMATRA

Djl. Pekalangan No. 56

TJIREBON

Impor — Ekspor dan Perdagangan Umum

Berita² Singkat : PERDAGANGAN ANTAR NEGARA

VOLUME PERDAGANGAN INDONESIA R.F.D. NAIK 27 PERSEN SELAMA 1965

Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Republik Federasi Djerman telah mengalami perkembangan yang pesat selama tahun 1965 dan omzet perdagangan antara kedua negara itu meningkat dari DM 398 djuta hingga DM 505 djuta yang berarti kenaikan sebesar 27 persen.

Kenaikan yang menjolok itu terutama disebabkan karena makin meningkatnya ekspor Indonesia ke Djerman yang sudah meningkat sebesar 38 persen antara tahun 1963 dan 1964 dan selama tahun 1965 meningkat lagi dengan 52 persen. Dengan demikian ekspor Indonesia ke Djerman selama dua tahun terakhir ini telah meningkat l.k. 92 persen, sedangkan dari seluruh ekspor Indonesia tanpa minjakkbumi 16 persen ditunjukkan ke R.F.D.

Menurut angka² yang tertjatat sampai September 1965 kenaikan ekspor Indonesia ke Djerman itu terutama disebabkan karena meningkatnya ekspor karet l.k. 64 persen, minjaksawit l.k. 173 persen, rempah² l.k. 29 persen, bahan pangan nabati l.k. 168 persen dan hasil² farmasi l.k. 127 persen. ***

Neratja dagang Indonesia-RFD aktif

Selanjutnya dikemukakan bahwa selama tahun 1965 ekspor Djerman ke Indonesia telah meningkat dengan 6 persen dari DM 214 djuta hingga DM 226 djuta dan dari seluruh impor Indonesia 18 persen berasal dari RFD. Mengenai neratja-dagang Indonesia dengan RFD selama tahun 1965 dapat dijelaskan bahwa neratja itu menguntungkan bagi Indonesia. Terhadap ekspor sedjumlah DM 278,6 djuta dari Indonesia ke RFD terdapat sedjumlah DM 226 djuta, ekspor Djerman ke Indonesia, sehingga ekspor Indonesia ke Djerman lebih besar DM 50,6 djuta.

Angka² tersebut diatas hanjalah mengenai Indonesia dan RFD sebagai negara produsen dan konsumen dan tidak mengenai ekspor tembakau Indonesia ke Djerman yang dilelang di Bremen yang hanya sebagian tinggal di Djerman.

Demikian a.l. keterangan counsellor ekonomi RFD, Dr Berninger kepada pers pada tgl. 6 April di Kantor Penerangan RFD di Djakarta. ***

PERDAGANGAN INDONESIA-PHILIPINA

Angka² statistik perdagangan antara Philipina dan Indonesia dalam tahun 1964 menunjukkan kenaikan 16,5% dibanding dengan tahun 1963 jiatu US\$ 18.593.343 dalam tahun 1963 mendjadi US\$ 22.243.209 untuk tahun 1964.

Ekspor Indonesia ke Philipina US\$ 18.580.405 dalam tahun 1963 dan dalam tahun 1964, mendjadi US\$ 21.947.391. Sedangkan Impor Indonesia dari Philipina dalam tahun 1963 sebesar US\$12.970 dan tahun 1964 sebesar US\$ 295.818. Dari angka ekspor Indonesia tahun 1964 termasuk US\$ 19.743.589 ekspor minjakkbumi.

PERDJANDJIAN DAGANG Philipina-Indonesia

Presiden Philipina Ferdinand E. Marcos telah memberikan persetujuan atas usul supaya perdjandjian dagang antara Philipina dan Indonesia diperbaharui dan disesuaikan kepada keadaan sekarang. Usul tersebut diadakan oleh Dubes Philipina untuk Indonesia, Narcisco Reyes, dalam penbitjaraan² di Istana Malacanang baru² ini. ***

ANGKA² PERDAGANGAN AUSTRALIA-INDONESIA

Ekspor Australia ke Indonesia menurun hampir tigakali selama bulan Djanuari hingga \$A 919.000. Sebaliknya impor Indonesia menurun \$A 323.000 untuk bulan berikutnya.

Djumlah impor selama bulan tersebut ditaksir sebesar \$A 759.000, sedangkan djumlah impor selama tujuh bulan pertama dari tahun keuangan ini adalah \$A 36.712.000 yang berarti menurun sebesar \$A 408.000 dibandingkan dengan tahun jang lalu.

Ekspor selama tujuh bulan itu adalah \$A 30.000 berkurang sebesar \$A 667.000 dibandingkan dengan tahun jang lalu. Demikian pengumuman Biro Sensus dan Statistik Australia pada akhir bulan Maret 1966 jl. ***

EKSPOR INDONESIA KE NEDERLAND NAIK 16% DALAM TAHUN '65

Perdagangan Indonesia dengan Nederland berkembang dengan memuaskan, demikian madjalah kedutaan besar RI "Indonesia" terbitan Maret-April. Ekspor Indonesia ke Nederland dalam tahun 1965 mentjapai l.k. 400 djuta gulden, dibandingkan dengan 343 djuta gulden dalam tahun 1964; berarti naik 16%. Ekspor Indonesia ke Nederland dalam tahun 1965 dan 1964 adalah sbb. (dalam gulden).

	1965	1964
Kopi	8.014.000	5.191.000
Teh	6.704.000	9.519.000
Kopra	27.225.000	11.152.000
Bidji sawit	3.384.000	1.125.000
Minjak sawit	36.233.000	34.314.000
Timah (bidjih)	178.210.000	170.788.000
Minjak mentah	111.984.000	84.897.000
Karet	5.464.000	4.662.000
Rempah ²	3.599.000	3.887.000

Dari angka² tersebut tertjatat bahwa dua djenis barang yakni timah bidji (45%) dan minjak mentah (29%) meliputi 74% dari seluruh ekspor Indonesia ke Nederland.

Ekspor Nederland ke Indonesia, yang terutama terdiri dari barang² mesin dan bahan² baku untuk industri serta spareparts untuk mesin² dalam tahun 1965 mentjapai 94.920.000 gulden, dibandingkan dengan 43.017.000 gulden dalam tahun 1964; berarti naik 119%. **

Commodities

TJOKLAT INDONESIA

Demikian baik mutu tjoklat Indonesia, terutama aromanya yang sedap, sampai2 dijadikan standard-monster oleh dunia. Djenis tjoklat jang mutunja itu adalah djenis tjoklat "D.R" (Djati-Ronggo), Unggaran, Djawa Tengah. Sehubungan dengan itu, tanaman tjoklat seluas lk. 2500 hektar jang ada sekarang direntjanakan untuk ditanam di Sumatra Utara dan Djawa Timur. Penghasil tjoklat lainnja didunia adalah Ghana (Afrika). Areal tanamannya meliputi 5 djuta hektar dan menghasilkan 70% dari tjoklat sedunia. Namun demikian Ghana masih membutuhkan tjoklat dari Indonesia untuk "pengharum" tjoklat produksinja. ***

ALKOHOL DAN SPIRITUS SEBAGAI BAHAN SANDANG

Oleh BPU-PN Gula dewasa ini telah ditemukan suatu penemuan baru dibidang sandang jang diteliti dari produksi tebu. Penemuan sebagai hasil research jang telah dilakukan selama ini ialah merupakan proses kimia antara alkohol tjairan tebu jang ditjampur dengan pulp (ampas tebu). Dari tjampuran kemudian didapatlah hasil "Cellulose Asetat" jang siap ditenun untuk dijadikan bahan sandang, mirip sutera. Bahan sandang dari ampas tebu itu mutunja hampir sama dengan bahan sandang2 impor. Seperti diketahui, alkohol jang merupakan hasil samping dari produksi gulapasis biasa digunakan untuk bahan tjampuran limun, gaskarbit,

terutama khusus untuk bahan sandang tsb. diatas, sekarang sedang dipikirkan untuk memperluas hasil produksi itu. ***

KAJU INDONESIA DI LUARNEGERI

Pasar kaju di luarnegeri akhir2 ini melonjak dengan hebat, hingga kaju2 kwalita duating-tinggi lebih rendah dari tahun jang lalupun telah menjadi rebutan importir2 kaju di Negeri Belanda, Inggris dan Djepang. Djenis2 kaju jang di Indonesia termasuk tak berharga seperti sonokeling, mahoni dan pilang di luarnegeri mendapat pasaran jang tak kalah larisnja dengan kaju djati. Alasan untuk kaju sonokeling jang baik jang ditunjukkan untuk bahan instrumen dapat mentjajarkan harga duakali lipat harga kaju djati. Dalam tahun ini kaju djati akan diekspor pula ke Amerika Serikat jang menjadi tempat pasaran jang baik. Tahun 1965 Perhutani Djawa Tengah telah mengekspor 4.107 m3 kaju djati. Demikian Perhutani Djawa Tengah. ***

BESI DALAM TEH

Kementrian Kesehatan Lybia telah melarang impor teh dalam pendjualannya setelah

diketahui adanya besi dalam teh jang diimpor dari Srilangka. Besi itu ditemukan ketik seorang pembesar kesehatan dengan sebuah magnet mengaduk2 teh tersebut. Dari pemeriksaan ternjata ada 0,44% besi mentah dalam teh itu. Lain djenis teh merah djuga mengandung besi. Teh hidjau dapat dikatakan bersih, ketjual jang memakai tjap „Al Ahram”.

Teh adalah minuman jang paling disukai di Lybia. ***

PRODUKSI TELUR SEDUNIA.

Laporan2 jang dikumpulkan dari 38 Negara menjatakan bahwa produksi telur sedunia dalam tahun 1965 meningkat. Selama tahun 1965 produksi telur berdjumlah 235 milyar butir. Namun demikian perdagangan internasional mengenai telur dan hasil2 dari telur dalam tahun 1965 terus menurun. Hasil telur di Amerika Serikat, negara penghasil telur terbesar tetap, jaitu sebanyak 5.4 djuta losin selama tahun 1965, djumlah mana sama dengan tahun 1964, 2 persen lebih tinggi dari tahun 1963.

Inggris mengalami kemerosotan, sedangkan Djepang penghasilannya meningkat 15 persen dari 1964. Denmark dan Negeri Belanda, negara2 eksportir terbesar untuk telur penghasilannya terus menurun dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada umumnya perdagangan telur sedunia menurun tiap tahun sedjak 1961 dalam tahun mana perdagangan telur telah mentjapai puncaknya. Sebab utama dari kemerosotan itu ialah karena negara2 Eropa jang merupakan pasaran besar bagi telur, telah meningkat usaha berdikarinya, a.l. Jerman Barat jang dulunya merupakan pasaran terbesar bagi telur dan hasil2 telur telah mengurangi impornja. Sedang Jerman Barat, Itali, Swiss dan Australia bersama2 telah meningkatkan hasil telur mereka sebanyak 40 persen. ***

DARI SIDANG DEWAN TIMAH INTERNASIONAL III.

Dalam sidang Dewan Timah Internasional III di London baru2 ini, delegasi Indonesia — jang diketuai oleh Brigdjen R. Pirngadie, sekarang Deputy Menteri Pertambangan — bersama-sama dengan delegasi negara2 produsen timah lainnja menghadapi tugas berat jaitu menghadapi "politik" Amerika Serikat jang telah mengemukakan, bahwa untuk tahun 1966 ini akan melepaskan sedjumlah timah dari stockpilenja. Pelepasan timah dari stockpile AS tersebut pasti akan merupakan kegembiraan bagi para pembeli timah, terutama para pembeli bukan konsumen (spekulator). Meskipun demikian delegasi AS kesidang tersebut telah mendjandjikan bahwa mereka tidak akan mengatjaukan harga pasaran dan akan menuruti/mengikuti harga pasaran London serta tempat2 lainnja. Demikian Brigdjen R. Pirngadie. ***

— **EKSPOR DUNIA AKAN KAPAS** — Ekspor dunia akan kapas dalam tahun 1965/1966 hendaknya mendekati jumlah yang tertjapai ditahun yang lalu (1964-1965), jaitu sebanjak 16,6 djuta bal. Meskipun pengapalan kapas mentah pada awal tahun 1965-1966 ini lebih sedikit daripada periode yang sama dalam tahun j.l., melihat „stock” yang ada setjara netto dinegara² pengimpor kapas dan adanya harapan² yang menggembirakan dalam pemakaian dunia akan kapas, dapat diperkirakan kalau ekspor dalam tahun 1965-1966 akan setingkat pula dengan tahun 1964-1965. Sementara itu kegiatan pabrik² kapas disebagian besar negara konsumen menundjukkan „kelambatan”. Meskipun demikian djumlah konsumsi dunia akan kapas untuk tahun 1965-1966 diperkirakan akan melampaui konsumsi tahun j.l. dengan lk. satu djuta bal. Djumlah konsumsi dunia tahun 1964-1965 adalah 49,9 djuta bal. Sedang produksi tahun 1965-1966 diperkirakan akan mentjapai lk. 52,4 djuta bal. Demikian tndjauan Sekretariat Komite Penasehat „International Cotton”.

— **PRODUKSI DAN KONSUMSI KARET SEDUNIA** — Produksi karet alam dalam bulan Desember 1965 seluruhnya 225.000 ton, sehingga seluruh produksi dalam tahun 1965 tersebut telah tertjatat sebanjak **2.325.000 ton**. Konsumsi, termasuk taksiran diimpor oleh negara² sosialis Eropa dan RRT ialah sebanjak 212.500 ton dalam bulan Desember 1965. Konsumsi total dalam tahun 1965 dengan itu mentjapai **2.347.000 ton**, yang dari djumlah tersebut 256.250 ton dikirim ke Uni Sovjet dan 134.500 ton ke RRT. **Stock** karet alam pada akhir Desember 1965 tertjatat sebanjak **817.500 ton**, berarti lebih banjak 10.000 ton dari stock pada awal tahun 1965 (1 Djanuari 1965).

Produksi karet sintetis dalam bulan Desember 1965 267.500 ton sehingga meningkatkan produksi seluruhnya dalam tahun 1965 menjadi **3.002.500 ton** sementara konsumsinja sebanjak 252.500 ton dalam bulan Desember dan **2.907.500 ton** dalam seluruh tahun 1965. **Stock** karet sintetis pada akhir Desember **607.500 ton** yang berarti lebih banjak 32.500 ton dari stock pada 1 Djanuari 1965.

Demikian angka² sementara yang disiarkan Sekretariat International Rubber Study Group.

— **PASARAN KOPI DUNIA** — Meksiko telah mengambil keputusan untuk sementara mengundurkan diri dari pasaran kopi dunia berhubung dengan spekulasi setjara besar² yang bertentangan dengan semua negara produsen. Keputusan Meksiko itu diikuti pula oleh Guatemala dan Salvador dan kemudian besar oleh beberapa negara Amerika Tengah yang menghasilkan kopi, ketjuali Columbia.

Dapat dikemukakan bahwa sedjak permulaan tahun ini, harga kopi sedunia turun dari US\$ 0,90 per kg. menjadi US\$ 0,84, yang tentulah menjebabkan kerugian dalam bentuk devisa bagi negara² produsen kopi. Menurut data² yang terakhir dari Lembaga Kopi Meksiko, — Guatemala, Meksiko dan Salvador — mengekspor kopi sebesar 10 persen dari seluruh ekspor kopi sedunia dan pendapatan negara² tersebut dari ekspor itu merupakan salah satu sumber utama dari hasil perdagangan luar negeri.

Selanjutnya ditandaskan oleh ahli² kopi Meksiko bahwa penurunan harga kopi dalam tahun ini merupakan punjai sebab yang tidak wajar, jaitu akibat keputusan Lembaga Kopi Internasional dalam lembaganya mana negara² pengimpor kopi terbesar seperti Amerika Serikat dan Inggris mempunjai peranan penting. Menurut keputusan Lembaga tersebut, telah diberikan kwota ekspor kopi yang lebih besar kepada Afrika dan negara² Amerika Latin atas dasar persetujuan² multilateral. Akibat dari tindakan ini ialah terdjadinja dumping kopi sedunia bersamaan dengan turunnya harga kopi.

Pada akhir tahun yang lalu Brasilia menghapuskan usul untuk meningkatkan kwota ekspor untuk pemuliharaan kembali pasaran kopi dan kembalinya harga kopi hingga harga standard. Berkat bantuan keuangan dari Pemerintah Meksiko, produsen² kopi Meksiko telah memutuskan untuk memboikot pasaran kopi sedunia dan menunggu hingga harga kopi meningkat lagi.

Bank Pembangunan Nasional P.T.

(NATIONAL DEVELOPMENT BANK LTD.)
D.J.L. ORPA NO. 50 TILP. O.K. NO. 23948/22139
DJAKARTA — KOTA.

Menjelenggarakan semua urusan bank.

Direksi.

P. N. DHARMA NIAGA

M P O R : Mesin² untuk Pertjetakan — Industri — Pertanian — Perkebunan — Tekstil.

Mesin² Perkakas — Pendingin — Minjak Kelapa — Pompa² dan Mesin untuk Pembangunan.

Alat² Besar — Kereta Api — Mesin² Pertambangan Clark Forklifts. Mesin² DIESEL/Generating set — Alat² RADIO/elektronik/Telekomunikasi dan motor² listrik.

PERDAGANGAN UMUM : Dalam Negeri/Antar Pulau.

INSTALASI : Telepon dan listrik dengan tenaga² Ahli.

PERBENGKELAN : Service dan pemasangan mesin.

Kantor Pusat :

Djalan Tanah Abang Barat 6 - 8 - 10 — Djakarta.
P.O. Box 2028 — Tel. 47557 - 47577 - 49978 - 41974
Telex 292

Kantor Tjabang Djakarta

Djalan Djembatan Batu 50 — Tel. 22041 - 22042 - 22043 - 22044
Djakarta Kota.

Tjabang-Tjabang :

BANDUNG — SEMARANG — SURABAJA — MEDAN —
PONTIANAK — PALEMBANG — TJIREBON — JOGJA-
KARTA — MALANG — DJEMBER — BANDJARMASIN —
MAKASSAR — MENADO — AMBON — DENPASAR —
BANDA ATJEH — PADANG dan PAKANBARU.



WILD

instrument



sole agent



PANTJA Ni

P.N.N. KARYA TJOTAS DJAKARTA I

Digitized by Google

WARTA



RECEIVED

MAY 11 1966

Perdagangan

AP
W299
P433

18
23/24



23/24

25 MEI 1966

TH. XVIII

MADJALAH „WARTA PERDAGANGAN“

Terbit tiap 2 Minggu sekali

Diterbitkan oleh :

Departemen Perdagangan.

Pelindung :

J.M. Menteri Perdagangan dan Koperasi
Major Djendral D. Ashari

Penasihat :

Deputy Menteri Perdagangan
Kolonel Abdurachman Prawirakusumah.

Pemimpin Umum :

Ir. J.J. Pitoy M.A.

Dewan Redaksi :

— Major Drs Sukadjat
— Ir J.J. Pitoy M.A. Drs Darwis Umar
— Anwar B. Harahap — J. Lapian —
Ir Didi Abdurachman. —

Penanggung Djawab :

Anwar B. Harahap.

Pembantu Tetap :

Prof. Ir Teko Soemodiwirjo
Kol. Jusuf Ramli
R. Hertatijanto S.H.
Dr. J. Panglaykim
Drs. Soekarno, Drs. Susilo.

Pembantu Khusus :

Drs. Sidik Muljono
Ir. Ibnu Sudjono.
Kolonel Usman Ismail — Alamsjah S.B.P. —
R.H. Tuwaidan M.A. — Drs Sjaaf Mochtar
R. Isa —

Alamat Redaksi dan Tata Usaha :

Madjalah "WARTA PERDAGANGAN"
Direktorat Marketing dan Research
Djl. Tanah Abang Timur No. 87,
D J A K A R T A.

Pelaksana/Pertjetakan :

Kepala Pertjetakan P.N. Karya Tjotas
Burdi Reksodirdjo.

Pembayaran uang langganan dilakukan dimuka dengan :

1. Penjetoran atas Rekening Madjalah Warta Perdagangan Kode No. KB/WA/-194, pada Bank Negara Indonesia Unit I Djl. Thamrin, Djakarta.
2. Dinas Giro dan Tjek Pos atau dengan pos wesel jang langsung dialamatkan kepada Tata Usaha Warta Perdagangan Direktorat Marketing dan Research.

DAFTAR ISI :

Halaman

1. Tiap langkah dan usaha kita harus bernafaskan pengabdian jang murni (Amanat Menperdagkop)	1
2. Memperkenalkan : Deputy Menteri Maj. Djendral Achmad Tirtosoediro	3
3. Prasaran Waperdam Ekubang pada Munas Ekonomi	4
4. Tingkatkan taraf hidup petani (Sambutan Menteri Pertanian Frans Seda didepan Kongres P. I. I.)	6
5. R. I. B. tahun 1966	9
6. Komando Logistik Nasional	10
7. Tugas Dewan Bahan Makanan dialihkan pada Kolognas	12
8. Kologda	12
9. Menjusun sendi* ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi (Dr. Soebroto)	14
10. Beberapa pandangan mengenai kebidjaksanaan ekonomi (Dr. Soebroto)	17
11. Beberapa akibat inflasi di Indonesia	21
12. Variaberita/pengumuman Kemperdakop ...	28
13. Indonesia dan Dana Moneter Internasional (IMF)	30
14. L/C jang mengandung sjarat* jang tidak dapat dipenuhi c.q. dikuasai oleh Pemerintah ... Penjetoran kembali djumlah valuta asing oleh importir dalam hal	32
15. Keputusan* Munas Ekonomi	33
16. Adjaran Pemimpin Besar Revolusi : Kongres Kaum Ibu	37
17. Ketentuan Pembiajaan pembelian valuta ...	42
18. Variaberita Nusantara	43
19. Aneka berita singkat Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	46
20. C o m m o d i t i e s	48

Keterangan Gambar Kulit muka :

Para Nelayan sedang mendjemur ikan (asin)

hasil tangkapannya.

IZIN TERBIT :

SIT/'65 tgl. 3-9-1965, dan

Keputusan Menpen No. 00231/R/SK/DPHM

Keputusan Peperda Djakarta Raya dan Sekitarnya
No. Kep. 037/P/X/65, No. Urt. 5 tgl. 21-10-1965.

Pidato J.M. Menteri Perdagangan dan Koperasi pada Upatjara Appel Bendera tanggal 17 Mei 1966.

TIAP LANGKAH DAN USAHA KITA HARUS BERNAFASKAN PENGABDIAN JANG MURNI.



Menteri Perdagangan dan Koperasi
Maj. Djen. D. Ashari

Para Karyawan Kementerian Perdagangan dan Koperasi

Saudara² sekalian,

Pada upatjara tanggal 17 bulan Mei ini kami sampaikan pada Saudara² sekalian beberapa hal jang wadajib mendapat perhatian utama.

Saudara² Karyawan,

Tidak perlu didjelaskan lagi, karena kita sudah telah mengetahui, bahwa keadaan ekonomi negara pada dewasa ini djauh dari memuaskan benar² dalam keadaan gawat. Dalam rangka usaha Pemerintah untuk mentjari djalan keluar ke gawat ekonomi sekarang, perlu diinilah oleh kita semua, bahwa sorotan masyarakat djjukan terutama kepada Kementerian Perindustrian dan Koperasi beserta segenap aparat instansi² jang bernaung dibawahnja.

Harapan masyarakat agar supaya dalam djangpendek antara satu sampai tiga tahun dapat sakan adanya titik² terang dalam kehidupanajat dan selandjutnja berkembang kearah pembangunan ekonomi setjara keseluruhannya, upayakan tantangan jang harus dihadapi dan dit diatasi. Bahkan dalam djangka waktu satu

tahun, diharapkan tertiptanja iklim politik pschologis sebagai prasarat dan landasan untuk menungkinkan terlaksananja program rehabilitasi dan Stabilisasi Ekonomi Nasional tersebut.

Tugas jang dipertjakaan pada kita tidak ringan, penuh dengan tantangan dan rintangan, penuh dengan keharusan pemerasan tenaga dan fikiran. Maka oleh karenanja, sebagaimana jang telah kami katakan pula pada upatjara bendera bulan jang lalu setiap langkah dan usaha kita harus bernafaskan pengabdian jang murni, djauh dari niatan kepentingan perorangan, kelompok ataupun golongan. Ingatlah senantiasa, bahwa kita disorot oleh dan tiap tindakan, baik jang lurus apalagi jang njeleweng akan diketahui oleh umum.

Saudara² sekalian,

Dalam rangka usaha Pemerintah untuk melaksanakan Rehabilitasi dan Stabilisasi Ekonomi Nasional sebagaimana telah djajatakan oleh J.M. WAPERDAM EKUBANG dalam statementnja tanggal 12 April 1966 banjak sekali sektor² jang menjangkut bidang², dimana kita bertugas didalamnya.

Kita mempunjai andil jang besar untuk sukses atau gagalnja rentjana Rahabilitasi dan Stabilisasi tersebut.

Maka oleh karenanja sebagai pra-sjarat dari pada pelaksanaan tugas kita perlu adanya keinsjafan tentang tugas, persatuan dan kesatuan keadaan, hingga terwujud suasana jang tenang dan tertib agar dapat bekerdja setjara baik.

Dalam hal ini, kami sesalkan bahwa pada akhir² ini tampak adanya gedjaja² jang tidak sehat, dan dapat mendjalar mendjadi perpetjahan jang melemahkan. Untuk mendjaga djangan sampai timbul keadaan demikian maka kami terpaksa mengambil tindakan dengan membekukan untuk sementara Ormas Buruh K.B.M. sambil menunggu hasil dari Panitia Penertiban dan Pengamanan Personil. Kamipun mengetahui, bahwa diantara para anggauta K.B.M. untuk membersihkan oknum² jang tidak baik jang masih menodai kemurnian organisasi.

Disampingnja itu dengan ini diserukan, agar tindakan² kearah pembersihan Gestapu/P.K.I. beserta golongan² jang disebut plin-plan serta vested interest supaya melalui organisasi² jang ada, yakni Team² Screening jang berada pada unit² masing² dengan mengadjukan fakta² jang benar, djauh dari pada maksud² fitnahan.

Saudara² karyawan Perdagangan dan Koperasi,

Sebagaimana diketahui Pemerintah dengan Surat Keputusannya No. Aa/E/57/1966 tertanggal 4 Mei 1966 telah menetapkan adanya ruang lingkup, wewenang dan tanggung-djawab Menteri Perdagangan dan Koperasi.

Telah menjadi Keputusan Pemerintah, bahwa Koperasi merupakan wahana untuk menghantar kealam Sosialisme Indonesia, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Perkembangan dengan sukses dari sektor Koperasi bersama dengan sektor² Negara dengan didampingi oleh sektor Swasta akan merupakan kekuatan yang saling djalin-mendjalin, dan merupakan djaminan akan berhasilnya tudjuan kita. Akan tetapi perlu kita sadari bahwa Koperasi hanya dapat melaksanakan fungsinya dengan baik kalau Koperasi benar² berdiri diatas azas²nja dan tidak seperti yang terdjadi pada waktu² yang lalu bahwa Koperasi telah menjimpang dari azas²nja sendiri dan malahan berkembang sebagai sematjam badan politik. Dengan demikian, maka koperasi telah kehilangan sifatnja sebagai badan ekonomi rakyat yang demokratis dan tumbuh bukannya berdasarkan kekuatan swadaja para anggota²nja, tetapi sebaliknya menggantungkan kehidupannya semata-mata pada bantuan dan fasilitas Pemerintah. Azas swadaja dalam koperasi, bilamana kita berkembang akan merupakan sumbangan yang tidak ternilai besarnya dari pelaksanaan prinsip berdikari dalam perekonomian kita. Dalam hu-

bugan ini maka dua soal pokok yang dilakuk oleh Pemerintah untuk mengarahkan koperasi tidak boleh dipolitikan dan koperasi dikembalikan pada azas² yang sebenarnya.

Pemerintah ingin sekali memberikan kesempatan yang seluas²nja kepada Gerakan Koperasi untuk mengatur kehidupannya sendiri, dan karena itu Pemerintah berpendapat bahwa demokrasi dalam koperasi dimana kekuatan tinggi dalam koperasi adalah ditangan anggota, benar² harus ditegakkan kembali. Mengingat akan peranan koperasi seperti di atas maka bukanlah suatu keberuntungan, bahwa usaha perdagangan dan koperasi disatukan.

Kementerian Perdagangan dan Koperasi memang sengadja berbuat demikian karena untuk menghadapi serta mengatasi segala persoalan ekonomi pada waktu ini perlu dikerahkan semua funds and ofrces yang terhimpun dalam Sektor Negara, Sektor Koperasi dan Sektor Swasta.

Saudara² para karyawan sekalian.

Sebagai achir kata, hendaknya Saudara² memahami benar², bahwa Kementerian Perdagangan dan Koperasi bukanlah gelanggang perijaksanaan politik, atau arena penondjolan ambisi pribadi maupun merupakan sapi perahan, melainkan tempat pengabdian dan medan perdjolan untuk pengembunan dari Amanat Penderitaan Rakyat.

Marilah kita bekerdja dengan tekad, dan keyakinan yang lebih positif untuk melaksanakan tuntutan hati nurani Rakyat. * * *

P. N. ADUMA NIAGA

TJABANG CHUSUS TEKNIK

Djalan Antara No. 27 Djakarta

Tilpon No. 44233 - 42123 - 42991

- Import** : SEGALA MATJAM BARANG² TEKNIK.
- Mengerdjakan** : INSTALASI LISTRIK, PLUMBING, AIRCONDITIONING DAN LAIN-LAIN.
- Service & Reparasi** : AIRCONDITIONING, LEMARI ES, DIESEL DAN LAIN-LAIN.

Memperkenalkan :

Deputy Menteri Koperasi

Majdjen Achmad Tirtosoediro

Riwayat hidup singkat beliau adalah sbb. :

L A H I R :

Tanggal : 8 April 1922 di PLERED PURWAKARTA Djawa Barat.

PENDIDIKAN UMUM :

- H.I.S.
- M U L O. B.
- A.M.S. Tamat.
- Fac Hukum "GAMA" tahun ke-dua.

PENDIDIKAN MILITER :

- Tjuo Sainen Kunrensho.
- S.S.K.A.D.
- Command and General Staff College (C.G.S.C.) di U.S.A.

PENGALAMAN SEBELUM

MASUK T.N.I. :

Tamat dari Tyuo Kyo Shi Sho (Kereta Api) dan diangkat mendjadi Pegawai Menengah Tingkat II di Balai Besar Djawatan Kereta Api di BANDUNG (Tahun 1942 — 1946).

PENGALAMAN SELAMA DINAS T.N.I. :

Tahun : 1945-1946 TRI-KA.
Tahun : 1947 C.M. (Corps Mahasiswa) di M.B.T. JOGJA.
Tahun : 1948 Wakil K.S. K.D.M. Klatten (SURAKARTA) LETTU.
Tahun : 1949 ASS. K.S GM. IV — KAPTEN.
Sekretaris L.J.G. VI BANDUNG KAPTEN.
KS. K.M.K. BANDUNG, Pangkat KAPTEN.
Tahun : 1950 Kep. BIRO "B" PMT — DJABAR.
P.S.T. II GARUT.
Tahun : 1951 Naik Pangkat mendjadi MAJOOR.
Tahun : 1952 Kep. Bag. V/Be. C.
Tahun : 1952-1953 Kep. Staf Be. C. di TJIREBON.
Tahun : 1953-1954 PAMEN TT-III, tugas beladjar di SSKAD BANDUNG.
Tahun : 1954 Kep. Staf Res. 10 T.T. III.
Tahun : 1955 Komandan Sector A3 Res. 11 T.T. III (Prijanggan Timur).
Tahun : 1956 Naik Pangkat Mendjadi LET. KOL. Tugas Beladjar pada C.G.S.C. di U.S.A.



Tahun : 1957 Sekembali dari U.S.A. ditempatkan di SESKOAD.

Tahun : 1958 Asisten Direktur SESKOAD dengan Tugas Khusus mengurus persiapan taraf II S.S.K.A.D. dan duduk dalam DEWAN S.S.K.A.D.

Tahun : 1959 Kep. DEP. Staf dan pengetahuan UMUM.

Diterima untuk memperpanjang Ikatan Dinas MILSUK selama 10 Tahun.

Diangkat sebagai Golongan Karya Angkatan Bersendjata di DEPERNAS.

Tahun : 1960 Melakukan penindjauan ke EROPA selama 6 Minggu.

Disamping Djabatan Kep. DEP. ditetapkan pula sebagai Ketua Panitia & Team Pemeriksaan Udjian Masuk SESKOAD taraf II.

Tahun : 1961 Naik Pangkat mendjadi KOLONEL dan dipindahkan ke DITINT Sebagai DIREKTUR INTENDANS.

Duduk sebagai Wakil dari A.D. dalam Komisi istilah lembaga Bahasa dan Kesusastraan Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan SEKSI KEMILITERAN.

Tahun : 1962 Disamping Djabatan sebagai DIRINT diangkat sebagai DIREKTUR PERKAMPUNGAN INTERNASIONAL ASIAN-GAMES KE-IV.

Tahun : 1963 Idem sebagai DIREKTUR PERWISMAAN GANEFO-I.

Tahun : 1964 Naik Pangkat mendjadi BRIG. DJEN. T.N.I.

Tahun : 1965 Disamping tugas sebagai Direktur Intendans merangkap sebagai Ketua Gabungan VII/KOTI.

Tahun : 1966 Dibebaskan sebagai Direktur Intendans dan Ketua Gabungan VII/KOTI dan diangkat sebagai :

- 1). DEPUTY MENTERI, Kepala Departemen Koperasi.
- 2). Kepala Staf Komando Logistik Nasional (Kolognas)

Waperdam Ekubang

KEDUDUKAN DAN PERANAN SEKTOR SWASTA TETAP PENTING

Dibawah ini kami muat selengkapnja sambutan tertulis Wakil Perdana Menteri bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Sultan Hamengku Buwono IX, didepan Musjawarah Nasional Ekonomi pada tanggal 7 Mei jang baru lalu.

Panitia dan para peserta Musjawarah Nasional Ekonomi jang terhormat. Per-tama² kami minta maaf karena tidak dapat hadir sendiri pada upatjara pembukaan Musjawarah Nasional Ekonomi ini, oleh karena kesibukan pekerdjaan mengharuskan kami berada ditempat lain. Berhubung dengan itu kami mengharap mudah-mudahan sambutan jang kami sampaikan setjara tertulis ini dapat diterima baik.

Musjawarah Nasional Ekonomi jang pertama kali diadakan didalam suasana politik jang tidak tertekan sekarang ini merupakan suatu kedjadian jang penting didalam usaha kita bersama untuk membangun ekonomi jang demokratis dan sehat. Politik Pemerintah dalam bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan telah didjelaskan didalam statements kami tanggal 4 dan 12 April 1966, ditambah lagi dengan keterangan jang kami berikan kemarin didepan sidang Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong. Dari statements Pemerintah itu pada kesempatan ini kami ingin menjoroti suatu aspek jang kami kira sesuai dengan komposisi serta tudjuan dari Musjawarah Nasional Ekonomi jang hari ini dibuka dengan upatjara jang penuh berisikan harapan² baik. Aspek ekonomi jang kami maksudkan adalah aspek kedudukan swasta didalam Negara kita.

Kalau kita melihat kepada kenjataan dari kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia pada dewasa ini maka tak ada orang jang dapat menjangkal bahwa kedudukan dan peranan sektor swasta didalam struktur ekonomi kita adalah tetap penting. Meskipun sudah banjak didirikan perusahaan² negara dan perusahaan² niaga negara, namun sebagian terbesar dari ekonomi kita masih tetap ada ditangan para pengusaha swasta. Oleh karena itu sudah sewadjarnja apabila dari fihak Pemerintah diberikan perhatian jang memanfaatkan pada sektor swasta itu.

Bersandarkan atas kenjataan itu maka suatu sektor swasta jang lemah didalam ekonomi Negara kita akan mendjadi beban jang berat buat seluruh negara dan masyarakat. Selain tidak mampu untuk memberi bantuan untuk memperkuat kedudukan Negara maka sektor ekonomi swasta jang lemah sebaliknya malahan senantiasa mendjadi pemikiran pemerintah dan memerlukan pertolongan dari negara, hal mana mengurangi potensi Negara untuk mengembangkan diri dan masyarakat.

Sebaliknya apabila sektor ekonomi swasta kuat maka banjak persoalan² finansiil dan materiil jang mendjadi beban dan tanggung djawab Negara akan mendjadi lebih ringan. Jang terang

ialah bahwa sektor ekonomi swasta jang kuat tidak atau tidak banjak memerlukan bantuan Pemerintah, mungkin malahan sektor ekonomi swasta itu dapat menambah kekuatan Negara dalam usahanya mentjiptakan kesedjahteraan dan kebahagiaan untuk masyarakat.

Berlandaskan atas pendapat itu tadi maka kami berpendapat sudah sewadjarnja apabila dari fihak Pemerintah senantiasa agar ditjiptakan suatu iklim jang memberi kemungkinan kepada sektor ekonomi swasta untuk mengembangkan diri disamping sektor jang dikuasai oleh Negara. Seperti jang telah kami terangkan didalam statement kami jang dimaksudkan diatas, bahwa sekarang sudah tiba waktunja bagi Pemerintah untuk menganggap para pengusaha didalam sektor ekonomi swasta sebagai kawan, bahkan didalam banjak hal sebagai partner, dan tidak lagi sebagai musuh atau lawan.

Jang penting didalam hubungan antara sektor swasta dan sektor Negara didalam ekonomi ialah pembagian lapangan atau tugas jang djelas antara kedua fihak. Mengenai hal ini kami berpendapat bahwa sudah sewadjarnja apabila pengusaha barang² atau bahan-bahan jang strategis buat penghidupan rakjat banjak dan buat kelangsungan hidup Negara perlu ditempatkan didalam tangan Pemerintah sedang barang² dan bahan² lain dapat dikuasakan kepada para pengusaha swasta. Jang kami maksudkan dengan barang² dan bahan² strategis adalah barang-barang dan bahan-bahan jang begitu penting buat rakjat banjak atau Negara sehingga barang siap jang menguasainja dapat memberi pengaruh langsung dan mendalam serta meluas pada kehidupan rakjat banjak atau Negara.

Kalau kita melihat pada peranan para pengusaha swasta dalam waktu jang baru lampau maka kita tidak dapat mengingkari kenjataan bahwa sering terdjadi pertentangan antara tudjuan dari rakjat Indonesia jang sedang mendjalankan revolusi.

"Profit motive" adalah wadjar bagi seorang pengusaha swasta oleh karena keuntungan finansiil atau materiil itulah jang memberi hidup kepadanya. Disamping itu ada tudjuan dari Revolusi bangsa Indonesia jang didjiwai oleh pengertian "sama-rata-sama-rasa". Kedua hal sebenarnya didalam praktek dapat didjalankan bersama asal sadja para pengusaha swasta didalam tjanjag hidupnja se-hari² dapat menjesuaikan diri dengan keadaan ekonomi didalam masyarakat jang menngelilinginja.

Jang atjap kali menimbulkan pertentangan lah apabila ada seorang pengusaha swasta berhasil mengumpulkan keuntungan dan kekayaan jang demikian besarnya, sehingga kemewahan hidupnya menjadi menjolok dibandingkan dengan kehidupan masyarakat disekitarnya.

"Economic distance" jang demikian itu biasanya menimbulkan suatu "Sosial distance" dalam arti kerenggangan dalam hubungan antara orang-orang jang dengan masyarakat disekitarnya. Apabila keadaan politik dan keadaan keamanan tetap normal dan tenang, "economic" dan "social distance" itu tidak mempunyai akibat jang merugikan kedua pihak, akan tetapi apabila terdjadilah suatu krisis politik atau krisis sosial maka jang dah² orang² jang memisahkan diri dari masyarakat disekitarnya pasti mengalami akibat jang tidak menyenangkan. Akibat jang demikian itu biasanya lebih tjepat terdjadi apabila tjarannya seorang pengusaha untuk memperoleh keuntungan dan kekayaan tidak mengindahkan norma² jang dianggap baik oleh masyarakat umum.

Dengan singkat dapat disimpulkan pendapat masyarakat umum terhadap para pengusaha individu dalam sektor ekonomi swasta, bahwa seorang pengusaha swasta dibenarkan berusaha dengan segala akal dan daja jang ada padanya sehingga mendapat sukses finansial dan materiil jang ada disekitarnya.

Untung didalam masyarakat Indonesia relatif tidak banyak orang jang lupa akan masyarakat disekitarnya, dan kalau ada mereka itu mudah diawasi dan mudah dilakukan "social control" padanya.

Sebagai salah satu sektor jang mempunyai peranan penting dan pengaruh besar pada kehidupan masyarakat umum maka diharapkan agar sektor ekonomi swasta benar² dapat mengembangkan diri dengan kekuatan² jang ada pada dirinya sendiri. Pada umumnya diketahui bahwa para pengusaha swasta di Indonesia jang ber-djuta² jumlahnya sebagian terbesar merupakan pengusaha ketjil dan lemah.

Oleh karena itu harus didapat suatu jalan untuk memperkuat kedudukan dan kehidupan mereka itu. Salah satu jalan adalah proteksi dan bimbingan dari Pemerintah. Dengan segala senang hati Pemerintah akan memberikan proteksi dan bimbingan jang diperlukan itu, akan tetapi sebenarnya lebih baik apabila para pengusaha swasta itu lebih mengandalkan pada kekuatan diri sendiri daripada menjandarkan diri pada proteksi dan bimbingan Pemerintah.

Untuk memungkinkan hal itu maka jalan jang kedua untuk memperkuat kedudukan dan kehidupan sektor ekonomi swasta adalah djika para pengusaha dapat mengorganisasi diri. Jang dimaksudkan bukannya organisasi jang diperintahkan atau dipaksakan dari pihak Pemerintah, oleh karena organisasi jang demikian itu menimbulkan kemungkinan terdjadinya penggunaan organisasi itu untuk kepentingan Pemerintah saja dan hanya sedikit untuk kepentingan sektor ekonomi swasta sendiri. Jang diperlukan adalah organisasi ekonomi swasta jang timbul dari hati nurani para pengusaha swasta sendiri untuk keperluan para anggotanya dengan tidak melupakan masyarakat dan Negara.

Apabila organisasi jang demikian itu mampu untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri dan apabila organisasi itu setjara demokrasi jang djudjur dapat memperhatikan keperluan para anggotanya tanpa diskriminasi maka tidak banyak alasan bagi Pemerintah untuk ikut tjampur didalam urusannya intern. Akan tetapi apabila organisasi jang demikian itu ternyata hanya menjadi alat saja dari suatu golongan tanpa mengindahkan kepentingan para anggotanya, maka sudah barang tentu Pemerintah berwadajib untuk memberi koreksi jang sewadjarinya.

Demikianlah sambutan kami jang singkat pada upacara pembukaan Musjawarah Nasional Ekonomi. Achirulkata kami berdo'a semoga Musjawarah ini dapat berlangsung dengan lantjar dan memberikan hasil untuk membuka jalan kearah ekonomi jang sehat dan kuat di Negara kita.

C.V. KOTA MAS

Djalan Pekalangan no. 73
T J I R E B O N

Import & Export
dan Perdagangan Umum.

TUGAS KEMENTERIAN PERTANIAN a.l: MENINGKATKAN KEHIDUPAN PETANI

Sambutan Menteri Pertanian Drs. Frans Seda dimuka Kongres P.I.I. (Persatuan Insinjur Indonesia)
Pada tanggal 13 Mei 1966.

1. Tugas Kementerian Pertanian ialah tidakanja berusaha keras menaikkan produksi dan ekspor dari hasil pertanian, tetapi djuga untuk mengusahakan peningkatan dari kehidupan para petani jang merupakan tidak kurang dari 70% penduduk Indonesia.

2. Bukan asing lagi bagi kita semua, bahwa diseluruh dunia produksi dalam bidang Pertanian adalah paling sulit djika dibandingkan dengan produksi dalam bidang Industri.

Dengan Pertanian dimaksud disamping produksi Bahan Makanan dan Perkebunan djuga Kehewan, Perikanan, dan Kehutanan.

Sebabnja ialah bahwa dalam bidang produksi Pertanian, faktor alam mengambil peranan jang sangat besar dan menentukan.

3. Kemajuan2 dalam teknik bertjotjok tanam, dalam pengetahuan pemupukan, dalam berbagai teknik irigasi, dalam pembrantasan hama dan penjakit dan kemajuan2 dalam research menemukan djenis unggul, semua membantu kita dalam mengatasi kesulitan2 jang datangnja dari Alam itu, dan membawa produksi Pertanian ke arah efisiensi jang lebih tinggi.

Tetapi walaupun demikian, djika diadakan perbandingan maka kemajuan dari efisiensi dalam sektor Industri, bahkan dalam sektor Pertambangan, djauh lebih pesat daripada dalam bidang Pertanian.

4. Dari itu. bagaimanapun djuga djauhnya mekanisasi dan intensifikasi dalam Pertanian dijalankan, para petani jang bersangkutan tidak djuga dapat mengikuti kecepatan kemajuan tingka'an hidup setjara ril jang ditjapai oleh tenagakerdja dalam bidang Industri.

5. Tiap2 negara Industri jang maju pasti mempunyai legislasi perundang2an untuk membantu, memberi subsidi, bidang Pertaniannya.

Amerika Serikat sudah mempunyai sistim itu dari waktu sebelum Perang Dunia II, jaitu di tahun 1933.

Di Inggrisipun Pertanian mendapat proteksi.

Beberapa Negara di Eropa, a.l. Djerman, mempunyai Undang2 jang menentukan bantuan2 kepada golongan Petani.

Dan dalam rangkaian Persemakmuran Bersama Eropa, sistim inipun mulai dilakukan, dengan a.l. tjara tarif legalisasi.

Alasan jang penting dari usaha2 itu ialah tidak lain daripada mengurangi perbedaan2 jang menjolok antara Sektor Industri dan Sektor Pertanian, dengan demikian menghindarkan kesulitan2 sosial dan politik.

6. Bagaimana di Indonesia sekarang. Perekonomian Indonesia masihdjauh dari tingkatan didalam mana kehidupan dalam sektor Industri merupakan saingan jang serius bagi kehidupan petani.

Walaupun demikian gejala2 urbanisasi sudah djelas kelihatan dan di sekitar Industri Pertanian kita sudah sekedar dirasakan „wrijvingen2”/kele-gangan' sosial.

Di Indonesia, Pertanian kita masih merupakan suatu pos penghasilan Nasional jang terpenting. Industri masih dalam permulaan perkembangannya.

7. Sekalipun sistim Pertanian di Indonesia tidak tergolong sebagai jang terbelakang, tetapi dalam tekniknya, lebih2 dalam sektor Pertanian rakjatnja, masih diperlukan usaha2 perbaikan jang banjak sekali.

8. Dalam lapangan Perkebunan Besar, Indonesia tidak lagi menduduki tempat jang paling tinggi dalam hal produktivitanja.

Produksi beras masih djauh kalah efisiensinja dan Negara2 seperti Djepang, Italia atau Spanjol.

Dari sebab itu ruangan masih tjukup luas untuk mentjurahkan kekuatan dan ketjakaan kita guna memperbaiki keadaan pertanian kita itu. Berbagai usaha perbaikan sedang kita lakukan.

9. Dalam Perkebunan Besar kita sudah „mentjarter” team2 efisiensi bangsa asing, jang akan melaporkan kepada kita tindakan2 apa jang harus diambil guna menaikkan produktivita dan efisiensinja.

Dalam hal ini para insinjur kita dapat ikut beladjar tentang tjara' survey dan analisa dari ekspert' jang kita sewa dari luarnegeri iu.

Jang mendapat perhatian besar adalah tanaman kelapasawit kita dan djuga karet, kedua2nja merupakan hasil ekspor jang masih tergolong kuat Saingan2 dari sintetika dalam perkaretan mendorong kita untuk mengusahakan ratio dari produktivita sebaik mungkin.

Arus dari sedjarah perkaretan alam di pasaran dunia tidak akan dapat terbendung. Surplus2 jang akan mengakibatkan menurunnja harga lambat atau tjepat akan timbul.

Hanja produktivita dan kwalita jang tinggi, dan presentasi jang tidak kalah dengan presentasi (tjara memasarkan) dari karet tiruan, dapat tetap menegakkan karet alam kita di pasarandunia.

10. Dalam forum Internasional, a.l. di International Rubber Study Group di U.N. Trade and Development Conference, bersama dengan lain2 negara produser karet chususnya, dan produser bahan mentah Pertanian umumnja kitapun berdjuaug utk. menghilangkan kesewenang2an jang dilakukan oleh para Negara Industrialis/konsumen jang semuanya tergolong negara2 nekolim.

Dalam sektor Pertanian saja akan hanja merintang soal produksi beras. Pemerintah telah merpriorita kepada produksi beras ini, karena arti jang terpenting pada waktu sekarang dalam menanggulangi ekonomi Nasional.

Saudara2 hendaknya saya bawa dulu untuk sekedar meninjau ke belakang. Usaha kita untuk menaikkan produksi beras melalui pemupukan sudah kita jalankan lebih dari 10 tahun.

Walaupun tidak semua, tetapi sebagian pasti kita pakai buat produksi beras.

Impor kita dari pupuk adalah sebagai berikut :

1945 — 104.500 ton	1960 — 228.300 ton	angka2 :
1955 — 148.100 "	1961 — 346.400 "	B.P.S.
1956 — 148.200 "	1962 — 446.800 "	
1957 — 207.900 ton	A	
1958 — 157.000 "		
1959 — 254.000 "		

Apakah hasil dari usaha itu.

Tahunpangkal kita ambil tahun 1952, kemudian angka2 tahun 1960 dan achirnja tahun 1964.

Tahun	Produksi beras Indonesia/ton	Djumlah penduduk	Per Capita kg
1952	6.108.000	80.329.000	76
1960	8.430.000	95.329.000	88
1964	8.677.500	104.226.000	83

Sekalipun tidak terlampau mengesankan, tetapi usaha kita dalam menaikkan produksi dalam waktu2 jang lalu ada djuga hasilnja,

Penduduk naik dengan 30%, tetapi produksi dengan 42%. Dan supply per capitapun dari 76 naik menjdadi 83 kg.

Demikianlah angka2 Nasional :

Tetapi kesulitannja ialah bahwa Negara kita ini terdiri dari pulau2 dengan aparat distribusi (infrastruktur) jang tidak terlampau sempurna. Dari itu kalau angka2 itu pro'eksi atas Pulau Djawa dan Pulau2 lainnja, maka kelihatanlah bagaimana seriusnja soal Distribusi.

PULAU DJAWA

Tahun	Prod. beras ton	Penduduk	Per capita kg
1952	4.040.000	52.437.000	77
1960	4.828.000	61.901.000	79
1964	5.109.000	67.826.000	75

PULAU - PULAU LAIN

Tahun	Prod. beras ton	Penduduk	Per capita kg
1952	2.063.000	27.892.000	74
1960	3.602.000	33.358.000	108
1964	3.563.500	36.400.000	98

Djelaslah bahwa, karena Distribusi penduduk jang tidak merata itu Pulau Djawa keadaan supply dan demand dari beras tiap tahun makin sulit. Sekalipun produksi antara 1952 dan 1964 menundjukkan kenaikan \pm 26%, tetapi penduduk naik dengan 29%, sehingga supply per-capita dari 77 turun ke 75 kg. Menurut angka sementara 1965 naik lagi.

Penduduk naik dari 1952 kira2/dengan 32% selangka produksi naik dengan 49%.

14. Laitnhalnja dengan di luar Djawa, dimana ekstensifikasi dapat dilakukan seluas2nja. Tahun 1964 tetap menundjukkan kenaikan supply per-capita dibandingkan dengan tahun 1952, sekalipun lebih rendah dari tahun 1960.

15. Dari angka2 tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa disamping kesulitan umum jang diderita dari alam dalam bidang produksi beras, Indonesia mengalami kesulitan lebih besar lagi untuk mengefektuirnja, karena struktur Negara jang berpulau2 itu.

16. Perlu diakui bahwa sistim intensifikasi jang benar2 efektif belum kita tjapai dalam masa sampai tahun 1964, dan supply dari alat2 penolongnjapun tidak dapat disebutkan sempurna, tetapi bagi kita problema jang timbul dari struktur Negara kita itu tjukup serious.

Bagi Saudara2 problema itu kiranja tjukup menjdadi bahan pemikiran untuk mendapatkan way out kearah kesempurnaan dari distribusi beras setjara merata di seluruh Negara.

Problema transmigrasi dan Problema Infrastruktur.

17. Kementerian, jang sudah menemukan sistim intensifikasi melalui BIMAS didalam mana berbagai Universitas diintegrasikan dalam produksi, terutama di Pulau Djawa, guna menanggulangi mendesaknja bertambah kepadatan penduduk.

Pun diusahakan projek2 pangan di dekat wilayah/kota2 konsumsi jang padat (seperti : Djakarta, Medan) dan daerah2 perkebunan dan industri dalam rangka djaminan stabilisasi supply dan harga beras.

Tetapi walaupun demikian problema2 jang saja kemukakan itu tetap tidak akan kurang accuutnja.

18. Selain dari itu adalagi persoalan jang djuga ada hubungannja dngan kepadatan penduduk dan produksi beras, jang kiranja djuga sangat tjotjok bagi Saudara2, Insinjur untuk dipetjahnja. Jaitu soal bandjir di Pulau Djawa jang tiap tahun tidak hanja memusnahkan tanaman padi, ternak dan lain2 harta-benda rak'at, tetapi djuga djiwa manusia.

19. Kementerian sendiri, dalam soal pemberantasan bandjir, mendjalankan usaha penghidjauan, penghutan dari gunung2 jang gundul, mengatur tanaman2 rakjat dengan sistim terasing.

20. Tetapi lebih sempurna penguasaan bandjir dapat terlaksana kalau seluruh debiet dari sungai jang berbahaya itu dimasukkan didalam suatu projek, didalam mana didjalankan penertiban dari tanah2 hutan rakjat, dan penormalisasian dari sungainja sendiri.

21. Kalau diambil tjontoh tjara pemejahnja seperti sungai Tennessee di USA, negara bagian Tennessee, dimana „watershed-management” itu diurus oleh sebuah Otorita dengan fonds2nja sendiri, didalam mana otorita2 itu berhak untuk menguasai dan memungut djasanja dari karya2nja,umpamanja dari dam2 listrik jang dibikinnja, mendirikan berbagai matjam industri atau mendjual aliran listrik kepada pihak ketiga, maka Pemerintah akan tertolong sekali.

„Watershed-Management” tertjapai; Normalisasi dari kali2 dengan dam2 hidraulik dan pengairan terlaksana;

Industri dapat didirikan dari kekuatan aliran² listrik. Tekanan terhadap tanah oleh rakjat alias landhonger dikurangkan, karena orang² bekerdja di industri². Bandjir akan lenjap samasekali.

Satu tantangan bagi para insinjur² dari segala bidang, — bidang Kehutanan, Pertanian, Sipil, Mesin, listrik dan seterusnya.

22. Achirnja, sedikit tentang rentjana transmigrasi besar²an seperti yang diusulkan oleh PJM Presiden baru² ini, yakni pemindahan 2 djuta orang setiap tahun dari Pulau Djawa keluar Djawa.

Suatu usaha transmigrasi yang ingin mengatasi persoalan² kepadatan penduduk di Pulau Djawa, landhonger dan soal pangan sekaligus dengan mengintegrir kedalamnja soal pembukaan hutan dan pendajugunaan hasil hutan yang dibuka itu, baik sebagai bahan pembangunan maupun sebagai bahan finansii-
nja dari rentjana transmigrasi.

Suatu rentjana yang diakui urgensi sosial-ekonomisnja, namun memiliki banjak implikasi² teknis dan organisatoris kuantitatif maupun kualitatif yang pada achirnja harus diudji lagi pada kemampuan kemungkinan ekonomis serta realisasinja dalam bidang mental dan sosial psychologis.

Ini semua minta persiapan² serta perentjanaan dan survey² yang matang yang pelaksanaannya tahap demi tahap dapat diadakan sambil kita mengintensif mulai dengan sekarang ini djuga transmigrasi spontan dan transmigrasi Pemerintah, dan sebagainya ke daerah² pasangsurut seperti yang telah direntjanakan oleh Dep. Pengairan di Sumatra Selatan dan Kalimantan serta transmigrasi ke daerah² Perkebunan Negara dan Rakjat.

Dengan sedikit lebih melantjarkan perhubungan/ transpor darat dan laut serta peraturan²nja, maka dengan mudah kita dapat meningkatkan transmigrasi dalam 3 tahun ini sebagai berikut :

Tahun 1966 — 1967

spontan	100.000 orang
diatur oleh Pemerintah	67.000 orang

perkebunan Negara dan perk. Rakjat	40.000 ora
lain - lain	10.000 ora
D j u m l a h	217.000 ora

Tahun 1967 — 1968

spontan	150.000 ora
diatur oleh Pemerintah	257.400 ora
perkebunan Negara dan perk. Rakjat	50.000 ora
lain - lain	12.000 ora
D j u m l a h	469.400 ora

Tahun 1968 — 1969

spontan	200.000 ora
diatur oleh Pemerintah	288.000 ora
perkebunan Negara dan perk. Rakjat	50.000 ora
lain - lain	12.000 ora
D j u m l a h	550.000 ora

- a. Perentjana transmigrasi spontan berdasarkan pengalaman bahwa sampai tahun 1962, rata² s minggu dari Pulau Djawa berangkat 2000 orang
b. Transmigrasi Pemerintah berdasarkan Rencana Departemen Pengairan, dalam hal pembukaan tanah.

t a h u n 1966

kanalisasi Kalimantan	13.500 ha
S u m a t r a	18.000 ha
polder Alabio Kalimantan	2.000 ha
	<hr/>
	33.500 ha

t a h u n 1967

kanalisasi Kalimantan	91.200 ha
kanalisasi Sumatra	37.000 ha
	<hr/>
	128.500 ha

t a h u n 1968

kanalisasi Kalimantan	97.000 ha
kanalisasi Sumatra	47.000 ha
	<hr/>
	144.000 ha

Djadi masih banjak tugas yang harus dilaksanak dan Saudara², para Ir tidak bebas dari tugas² ini

C.V. RUKUN DJAJA

Djl. Pekalipan 75, Telp. 942 & Timur 1607

TJIREBON

EXPORT & COMMISSIONER

Code : ANGCHUHUI'S

Alamat Kawat : RUKUNDJAJA

RENTJANA IMPOR BARANG TAHUN 1966 DITETAPKAN SEBESAR US. \$ 225 DJUTA

Keputusan Presidium Kabinet Dwikora
Republik Indonesia No. Aa/E/67/1966
tertanggal 20 Mei 1966.

PRESIDIUM KABINET DWIKORA :

Memimbang :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi keuangan dan pembangunan Pemerintah dalam tahun 1966, pembiajaan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia pada umumnya dan untuk pertambahan serta pengembangan produksi nasional pada khususnya;

Bahwa penggunaan devisa Negara bagi impor barang² harus diatur setjara efektif dan efisien;

Bahwa devisa yang tersedia untuk impor barang harus diatur penggunaannya setjara menjeluruh.

Memingat :

Pasal 4 ayat 1 Undang² Dasar Republik Indonesia;

Penetapan Presiden No. 26 Tahun 1966;

Keterangan Pemerintah didepan sidang DPR-GR tanggal 6 Mei 1966 mengenai kebijaksanaan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi-Keuangan dan Pembangunan tahun 1966;

M E M U T U S K A N :

Ditetapkan :

Utama :

Mendahului Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, mentjabut Keputusan Presi-

den Republik Indonesia No. 23 Tahun 1966 tanggal 2 Pebruari 1966;

Kedua :

Rentjana Impor Barang Tahun 1966 ditetapkan sebesar US. \$ 225 djuta (duaratus duapuluh lima djuta US Dollar), untuk keperluan impor bahan baku/penolong dan spare parts bagi aparat produksi yang telah ada.

Ketiga :

Sesuai dengan program rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi diperkirakan Rentjana Impor Barang untuk Tahun 1967 sebesar US. \$ 525 djuta (limaratus duapuluh lima djuta US. Dollar);

Keempat :

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presidium ini diatur oleh Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dengan dibantu oleh Panitia Rentjana Impor Barang 1966.

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 20 Mei 1966.

A.n. Presidium Kabinet Dwikora R.I.
Wakil Perdana Menteri Bidang
Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan,

t. t. d.

(Sri Sultan Hamengkubuwono)

P.T. " KENTJANA YUDA "

ACTIVE IN EXPORT, IMPORT, INDUSTRY AND AGRICULTURE

Bankers :

Bank Dagang Negara
Asia Africa Banking Corporation

Cable Address :

KENTJANA DJAKARTA

Head Office :

Djalan Antara no. 35
Phone : 47752 — 48653

DJAKARTA

Branch Office :

Palembang, Telukbetung,
Bandjar dan Surabaya.

Keputusan Presiden R.I. No. 87 Tahun 1966 :

PEMBENTUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN ORGANISASI KOMANDO LOGISTIK NASIONAL (KOLOGNAS)

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

1. Perlu segera diadakan usaha kearah perbaikan taraf hidup rakyat dengan djalan mendjamin terpenuhinja kebutuhan pokok hidup sehari-hari chususnja Pangan dan Sandang.
2. Bahwa kegiatan Badan²/Lembaga² Pemerintah maupun Swasta jang bergerak dalam bidang pengusahaan, pembiajaan, pengangkutan, penjimpanan dan penjaluran bahan² pokok kebutuhan hidup sehari-hari perlu lebih dikoordinasikan, disinkronisasikan dan diintegrasikan sehingga lebih terarah.

Mengingat :

Surat Keputusan Presiden No. 63 tahun 1966 tentang Penjusunan Kabinet Dwikora jang lebih disempurnakan lagi;

Memperhatikan :

Pertimbangan Presiden Kabinet Dwikora;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Membentuk Komando Logistik Nasional selandjutnja disingkat KOLOGNAS, dengan kedudukan, fungsi, tugas dan organisasi menurut ketentuan sebagai berikut :

BAB — I

KOLOGNAS.

Pasal — 1.

Kedudukan

1. KOLOGNAS adalah suatu badan Pemerintah, merupakan satu Komando Utama jang melakukan pengendalian operasionil dalam bidang² :
 - pengusahaan
 - pembiajaan
 - pengangkutan
 - penjimpanan dan
 - penjaluransemua bahan pokok kebutuhan hidup sehari-hari jang diawasi.
2. KOLOGNAS berkedudukan dibawah Wakil Perdana Menteri bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Pasal — 2.

Fungsi

Sebagai suatu Komando, KOLOGNAS mempunjai fungsi-fungsi :

- perentjaan
- kordinasi dan

— pengawasan

terhadap semua kegiatan operasi Badan²/Lembaga² jang bergerak dalam bidang pengusahaan, pembiajaan, pengangkutan, penjimpanan dan penjaluran bahan² pokok kebutuhan hidup sehari-hari.

Pasal — 3.

Bidang Tugas dan Pelaksanaannya.

KOLOGNAS bertugas melaksanakan kebijaksanaan umum politik perekonomian Pemerintah chususnja jang menjangkut masalah penediaan dan penjaluran bahan² pokok kebutuhan hidup sehari-hari, dengan djalan :

— menentukan program pelaksanaan,

— memimpin pelaksanaan dalam arti mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan

— mengawasi hasil pelaksanaan

tugas² dan kewadajiban Badan²/Lembaga² Pemerintah maupun Swasta jang bergerak dalam bidang tersebut diatas.

Pasal — 4.

Organisasi

1. Organisasi KOLOGNAS terdiri dari unsur-unsur:
 - 1.1. pimpinan
 - 1.2. staf
 - 1.3. pelaksana
2. KOLOGNAS dipimpin oleh seorang Panglima dan seorang Kepala Staf.
3. Kepala Staf dibantu oleh sebuah Staf ketijil Usaha dan para Assisten jang menjelenggarakan urusan :
 - perentjaan pengusahaan
 - penjaluran, angkutan dan penjimpanan
 - pembiajaan
 - chusus.
4. a. Badan² teknis seperti Djawatan², Perusahaan-perusahaan Negara, Koperasi dan Perusahaan² Swasta, jang bergerak dalam bidang dan lapangan usahanja berhubungan erat dengan masalah penediaan, penjaluran bahan² pokok kebutuhan hidup sehari-hari setjara taktis operasionil merupakan unsur pelaksana umum dari KOLOGNAS.
 - b. Djika dianggap perlu, dengan senantiasa memperhatikan prinsip² ekonomi, Panglima KOLOGNAS dapat membentuk satuan² tugas (task forces) jang merupakan unsur pelaksana chusus.
5. Untuk lebih memperlantjar sekalian pelaksanaan operasi, Pimpinan KOLOGNAS dibantu oleh s...

buah badan Musjawarah Pimpinan jang terdiri dari semua Menteri dan Deputy Menteri jang berada didalam lingkungan echelon bidang EKUBANG.

Pasal — 5.

Susunan dan tanggungjawab

1. Wakil Perdana Menteri bidang EKUBANG, karena djabatannja mendjadi Panglima KOLOGNAS dan bertanggung djawab kepada Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S.
2. Kepala Staf KOLOGNAS diangkat, diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima KOLOGNAS dan bertanggung djawab kepada Panglima KOLOGNAS.
3. Anggota² Staf dan petugas KOLOGNAS diangkat, diberhentikan dan bertanggung djawab kepada Panglima KOLOGNAS.

Pasal — 6.

Semua pembiajaan KOLOGNAS dibebankan kepada Anggaran Pemerintahan Agung.

BAB — II

KOMANDO LOGISTIK DAERAH

Pasal — 7.

Ditiap-tiap Daerah Swatantra tingkat I dibentuk Komando Logistik Daerah selandjutnja disingkat KOLOGDA jang berkedudukan dibawah Gubernur Kepala Daerah.

KOLOGDA adalah suatu Komando Pelaksana Logistik di Daerah jang pada dasarnya melaksanakan kegiatannja berdasar kebidaksanaan KOLOGNAS.

3. Dalam menghadapi persoalan² khusus, KOLOGDA dapat mengambil kebidaksanaan lain dengan ketentuan agar segera dilaporkannja kepada KOLOGNAS.
4. Susunan organisasi KOLOGDA disesuaikan dengan susunan organisasi KOLOGNAS.
5. Gubernur Kepala Daerah karena djabatannja mendjadi Komandan KOLOGDA.
6. Semua pembiajaan KOLOGDA dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB — III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal — 8.

Hal-hal lain jang belum diatur dalam keputusan ini djika dianggap perlu dapat ditentukan kemudian oleh Panglima KOLOGNAS berdasarkan Keputusan ini.

Pasal — 9.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari bulan dikeluarkannja.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 26 April 1966

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

P.T. DUNIA TRUST

Djl. Asemka No. 9
DJAKARTA.

IMPORT & EXPORT

Tjabang² :

Tjirebon, Semarang, Surabaya.

Keputusan Presiden No. 106 Tahun 1966 :

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN
BAHAN MAKANAN DIALIHKAN KEPADA
KOLOGNAS**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

1. bahwa untuk mengamankan kebidjaksanaan umum politik perekonomian Pemerintah khususnya dalam bidang pengendalian kebutuhan bahan² pokok hidup se-hari², perlu segera ditjegah timbulnja keanekaragaman dalam kebidjaksanaan, tindakan dan garis pertanggungjawaban dari alat peralatan Pemerintah sendiri;
2. bahwa dengan keluarnja keputusan Presiden No. 87 Tahun 1966, tentang pembentukan, fungsi, tugas dan organisasi Komando Logistik Nasional Pemerintah bermaksud hendak mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan mengintegrasikan semua kegiatan badan-badan, Lembaga Pemerintah maupun swasta jang bergerak dalam bidang dan lapangan tugasnja berhubungan erat dengan masalah Logistik Nasional sehingga dapat ditjapai daja-guna dan hasil-guna jang se-besar²nja;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pemerintah menganggap perlu segera menjederhankan badan², Lembaga² Pemerintah jang lapangan tugasnja bersamaan;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden No. 63 dan 64 Th. 1966;
2. Keputusan Presidium Kabinet Dwikora No. Aa/B/48/1966 sehubungan dengan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 1964;

Memperhatikan :

Pertimbangan Presidium Kabinet Dwikora dan Menteri² jang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

P E R T A M A :

1. Terhitung mulai tanggal dikeluarkannja Keputusan ini mengalihkan sekalian tugas dan tanggungjawab Dewan Bahan Makanan jang menjangkut pengendalian bahan makanan kepada Komando Logistik Nasional (diintegrasikan).
2. Mengangkat Wakil Perdana Menteri bidang Umum mendjadi Penasehat dari Panglima KOLOGNAS.

K E D U A :

Akibat pengalihan tugas ini, Badan Pelaksana Urusan Pangan selandjutnja didjadikan salahsatu badan pelaksana dari KOLOGNAS.

**Instruksi Presidium Kabinet Dwikora R.I. No. 10/ E/
Instr./1966 :**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN
KOMANDO LOGISTIK DAERAH (KOLOGDA)
PRESIDIUM KABINET DWIKORA REPUBLIK
INDONESIA,**

Menimbang :

1. Bahwa dalam usaha memperbaiki situasi ekonomi dan keuangan pada umumnya Pemerintah tengah berusaha agar dalam taraf pertama dapat terlebih dahulu mengadakan perbaikan dan djaminan bahan² kebutuhan pokok hidup se-hari²;
2. Bahwa dalam usaha pengamanan kebutuhan bahan pokok hidup se-hari² tersebut, baik ditinjau dari segi pengadaan maupun penjalurannja Daerah² mempunyai peranan dan tanggung-djawab penting.
3. Bahwa usaha jang demikian perlu mendapat dukungan dan djaminan pengamanan dalam pelaksanaannja dari semua Instansi, Lembaga, Badan² Pemerintah maupun Swasta sedjak dari Pusat sampai ke Daerah, dengan djalan menyesuaikan semua kebidjaksanaan dan pelaksanaannja setjara lebih terkoordinasikan dan lebih terarah;

Mengingat :

Surat Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1966 tentang pembentukan, fungsi, tugas dan organisasi Komando Logistik Nasional;

Memperhatikan : Para Menteri jang bersangkutan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Menginstruksikan kepada semua GUBERNUR KEPALA DAERAH SWATANTRA TINGKAT I, agar supaja :

P E R T A M A :

Se-lambat²nja dalam tempo dua minggu setelah Instruksi ini diterima, telah selesai membentuk Komando Logistik Daerah (KOLOGDA) di daerahnja masing²;

K E T I G A :

Hal² jang menjangkut pengalihan pertanggungjawab materieel dan personeel diselenggarakan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja dan ditentukan bersama antara WAPERDAM bidang UMUM selaku KETUA DEWAN MAKANAN dan WAPERDAM bidang EKUBANG selaku PANGLIMA KOLOGNAS.

Dikeluarkan di Djakarta,
pada tanggal 19 Mei 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO

KEDUA :

1. Susunan organisasi dan personalia KOLOGDA hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi² Daerah, asal tidak menjimpang dari jiwa Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1966.

2. Ketjuali ada pertimbangan lain, Gubernur Kepala Daerah karena djabatannya menjadi Komandan Logistik Daerah.

3. Komandan Logistik Daerah dapat dibantu oleh sebuah staf jang meliputi unsur² :

- perentjanaan kebutuhan dan pengusahaan,
- pembiajaan,
- angkutan,
- pergudangan dan distribusi,
- dan sebuah Staf Ketjil Tata Usaha jang akan melakukan kegiatan KOLOGDA se-hari².

4. Pengisian personil hendaknya diambil dari tenaga² jang sudah ada pada Instansi² Pemerintah Daerah sendiri, sesuai dengan usaha² penghematan dan penjederhanaan jang sedang dilakukan oleh Pemerintah samasekali tidak diperkenankan mengadakan pengangkatan pegawai² baru.

KETIGA :

Fungsi dan tugas KOLOGDA sesuai dengan fungsi dan tugas KOLOGNAS untuk daerahnya.

Gubernur Kepala Daerah dalam kedudukannya selaku wakil Pemerintah Pusat dan sebagai Komando KOLOGDA setjara taktis operasional bertanggungjawab penuh dalam segi² logistik Daerahnya kepada WAPERDAM EKUBANG selaku Panglima KOLOGNAS.

KEEMPAT :

1. Dalam pembentukan KOLOGDA maupun dalam operasinya Gubernur Kepala Daerah diwajibkan untuk mengadakan kerdjasama jang se-erat²nja dengan fihak PEPELRADA cq PANGDAM setempat.

2. Mengingat pengalaman dan fasilitas jang telah dimiliki oleh unsur² logistik ABRI, diandjurkan sejojjanja para pembina logistik ABRI di Daerah dapat pula didudukkan dalam Staf KOLOGDA.

KELIMA :

1. Semua Badan jang mungkin telah ada dan bergerak dalam bidang logistik Daerah, dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1966 hendaknya organisasi, fungsi dan tugasnya disesuaikan dengan Keputusan tersebut diatas.

2. Dari ketentuan tersebut angka (1) diatas diketjualikan Badan² tehnis jang merupakan pembina logistik dari Angkatan².

Dikeluarkan di Djakarta,
pada tanggal 12 Mei 1966.

An. PRESIDIUM KABINET DWIKORA R.I.
WAKIL PERDANA MENTERI BIDANG
EKUBANG/PANGLIMA KOLOGNAS,

t.t.d.

(HAMENKUBUWONO IX)

N. V. IKANYI

Djalan Pekalipan no. 80

TJIREBON.

Import & Export

dan Perdagangan Umum.

MENJUSUN SENDI-SENDI EKONOMI BERDASARKAN PRINSIP EKONOMI

(Oleh : Dr. Soebroto)

Tjataan Redaksi :

Sebagaimana diketahui dari tanggal 6 s/d 9 Mei 1966, oleh Universitas Indonesia dengan kerdjasama dengan KAMI dan KASI serta dengan bantuan Dep. Perguruan Tinggi telah menjelenggarakan Simposium "Kebangkitan semangat '66" mendjeladjah Tracee baru. Dalam nomor ini kami sadjikan pada para pembatja prasaran² dari Dr. Soebroto; Drs. Soetanto, dan Drs. Tan Goan Tiang, mudah^an kita dapat mengambil manfaat daripadnja.

Pendahuluan.

Tata ekonomi suatu bangsa itu merupakan suatu organisasi merupakan suatu „Gestalt”, suatu kesatuan. Sendi² dari kesatuan djalin-mendjalin dengan mesra, jang satu mempengaruhi jang lain, sendi jang satu ditentukan oleh sendi jang lain. Pemerkosaan sendi jang satu, akan mempengaruhi sendi jang lain dan mempengaruhi kesatuan sebagai keseluruhan. Pengaruh timbal balik, djalin-mendjalinnja sendi² ekonomi itu berdjalan menurut hukum tertentu, mengikuti gaja dan irama prinsipe tertentu. Printah, komando, rapat raksasa, pidato² tidak akan mempengaruhi bekerdjanja mekanisme ekonomi, selama printah, komando itu tidak memperhatikan prinsip² jang mengatur bekerdjanja mekanisme itu tadi. Tidak menghiraukan hukum² ekonomi, mau tidak mau, lambat atau tjepat, tergantung dari daja tahan ekonomi itu, akan mengakibatkan rontoknja sendi² ekonomi itu, jang akan mengakibatkan rontoknja daja tahan politis, militer, dan achirnja daja tahan dari bangsa itu sendiri.

Sedjarah bangsa Indonesia, didalam 10 tahun jang terachir ini, menunjukkan kekuatan ekonomis jang makin lama makin menurun, teristimewa didalam 5 tahun jang terachir, dimana kebidjaksanaan negara tidak menghiraukan, kalau tidak mengkesampingkan sama sekali prinsip ekonomi didalam tindakan²nja. Pertimbangan politik, pertimbangan militer jang diutamakan dengan tidak memperhitungkan „economic cost” sama sekali. Akibat kesalahan jang didjalankan selama 10 tahun jang terachir ini, gedjalanja akan kulmineren didalam tahun 1966 ini, kalau tenaga progressif-revolusioner tidak berdiri serentak, untuk menjusun kembali sendi² ekonomi nasional kita berdasarkan prinsip² ekonomi.

Prinsip umum.

Prinsip umum jang berlaku bagi ekonomi tiap² keluarga, dan djuga keluarga besar seperti bangsa Indonesia, ialah bahwa kemampuan ekonomis (economic capabilities) itu ditentukan oleh kekuatan ekonomis (economic resources) jang riil, jaitu kekuatan ekonomis potensiil (kekajaan alam kita jang berlimpah, 105 djuta penduduk) jang telah digarap, telah dikerdjakan, telah dibangun. Dengan bahasa biasa, pengeluaran suatu bangsa itu harus ditentukan oleh pendapatan dari bangsa itu, spending harus disesuaikan dengan income, expenditure disesuaikan dengan revenue, atau didalam bahasa djawanja, „gedene empjak” (besarnja atap rumah), harus di-

sesuaikan dengan „kuate tjagak”, (kuatnja tiang rumah). Manakala „empjak” suatu rumah, melebihi kekuatan „tjagak” dari rumah itu, akan runtuhlah rumah itu. Manakala spending suatu bangsa terus menerus melebihi income bangsa itu, akan robohlah bangsa itu. Manakala pengeluaran bangsa Indonesia, dengan dalih apapun, melebihi pendapatan, akan merosotlah nama dan kedudukan bangsa Indonesia. tidak hanja didalam negeri, akan tetapi lebih² diluar negeri.

Kalau devisa jang kita terima hasil dari export dan djasa² lebih ketjil dari pada jang harus kita bajarkan kepada luar negeri, atau dengan perkataan lain neratja pembajaran kita defisit terus menerus, maka mau tidak mau ekonomi kita harus merasakan akibatnja. Atau harus terus menerus menekan import barang², jang toh telah terlalu rendah, atau kita harus mendapat hutang dari luar negeri. Hutang luar negeri harus kita bajar kembali, jang mau tidak mau akan mengakibatkan tekanan pada hasil export kita, jang mengakibatkan harus dikurangkan lagi import.

Sendi² ekonomi kita dibidang moneter, dibidang hubungan ekonomi dengan luar negeri, didalam 5, 6 tahun jang lampau ini morat marit sama sekali. Kedua sendi inilah jang sangat menentukan produksi didalam negeri. Dilanggarnja segala prinsip² ekonomi dibidang moneter dan ekonomi internasional, mengakibatkan kotjar-katjirnja produksi didalam negeri. Defisit didalam Anggaran Belandja jang terus menerus, disertai defisit didalam Neratja Pembajaran, mau tidak mau mengakibatkan tekanan ekonomi jang berat sekali kepada rakyat Indonesia.

Uraian ini selandjutnja hanja akan menjoroti keseimbangan, verhoudingen dan ratios, jang harus diperhatikan didalam bidang moneter dan dibidang hubungan ekonomi internasional.

Perbandingan-perbandingan didalam bidang moneter.

Dasar² sendi² dibidang moneter adalah umpamanya penerimaan negara, pengeluaran negara, pajak tak langsung, pajak langsung, pengeluaran untuk pegawai pengeluaran untuk ABRI, pengeluaran untuk Revolusi, djumlah uang beredar, djumlah uang giral dan djumlah chartal, tjadangan emas, tjadangan devisa dan lain sebagainya. Dasar² sendi tersebut tadi hanja saling mempengaruhi, akan tetapi jang satu harus berbanding jang lain menurut perbandingan tertentu.

BERAPA AGGREGATES DIDALAM ANGKA RELATIF

	G:R	dD/D	dM/M	dP/P	K
50	1.57	0.4	1.4	1.2	0.85
51	1.14	4.3	1.4	1.6	1.15
52	1.42	1.7	2.1	2.7	1.27
53	1.64	2.5	1.9	2.1	1.11
54	2.42	3.2	2.6	1.6	0.65
55	2.7	4	4.2	9.6	2.28
kw. 2			1.36	1.14	
kw. 3			1.38	1.76	
kw. 4			1.8	2.56	
56					
kw. 1	8.5	1.41	1.68	2.78	1.64

ana G adalah pengeluaran pemerintah, R penerimaan Pemerintah.

D adalah defisit, M jumlah uang beredar dan P adalah tingkat harga.

Angka² tersebut diatas adalah angka² relatif, yang menunjukkan beberapa kali naik didalam satu tahun. Dalam kolom pertama, kelihatan bahwa perbandingan antara penerimaan dan pengeluaran naik. Mula² rendah pada tahun 1961, pengeluaran negara menjadi makin lama makin besar, jika dibandingkan dengan penerimaan. Pada kuartal pertama dari 1966 pengeluaran menjadi 8 kali dari penerimaan.

Kolom kedua menunjukkan kenaikan defisit yang terus menerus. Defisit tahun 1961 adalah 4.3 kali dari defisit pada tahun 1960 dan pada tahun 1965, defisit adalah 4 kali dari defisit tahun 1964. Defisit negara yang terutama menyebabkan naiknya uang beredar.

Kita lihat lagi bahwa pada tahun 1965 uang beredar telah 4.2 kali dari tahun 1964. Hal inilah yang menyebabkan kenaikan harga yang besar sekali pada tahun 1965, yang naik 9.6 kali dibandingkan harga pada tahun 1964.

Didalam tabel ini perlu diperhatikan faktor k, yang menunjukkan berapa kali harga naik, disebabkan oleh kenaikan jumlah uang beredar. Sedjak tahun 1961 kenaikan uang sekali menyebabkan kenaikan harga yang dari satu kali, bahkan pada tahun 1965, faktor k adalah 2.28.

Ini menunjukkan pengaruh faktor non-ekonomis, seperti ketidakpastian politik, pada uang rupiah dan kebijakan Pemerintah yang sudah rendah sekali.

Bidang hubungan ekonomi internasional

Marilah kita pindah kebidang ekonomi internasional, soko guru yang kedua, yang mempunyai

pengaruh yang menentukan terhadap perkembangan ekonomi kita. Sendi-sendi ekonomi internasional, seperti export, import, jasa-jasa, capital inflow dan outflow, persediaan emas dan tjadangan devisa, djalin-mendjalin dengan erat sekali.

Hubungan kita ekonomis dengan luar negeri dapat kita batja dari Neratja Pembayaran kita, yang singkatannja kita sadjikan dibawah ini : hanya dapat ditutup dengan kredit luar negeri, pampasan perang dari Djepang. Djumlah modal yang kita terima yang terbanjak ialah pada tahun 1961 berdjumlah 365 djuta dollar terutama dari kredit luar negeri yang berdjumlah \$ 349 djuta.

Dari neratja pembayaran kita dapat kita lihat, bahwa kredit² luar negeri yang kita terima tidak dapat menutup kekurangan neratja perdagangan dan neratja jasa². Djalan satu²nja ialah untuk menggunakan tjadangan emas kita dan tjadangan devisa kita. Tetapi kalau itu sudah kosong, terpaksa ditjari hutang² yang berupa „deferredpayments”, seperti yang terdjadi pada tahun 1965, dimana hutang djangka pendek berdjumlah \$ 145 djuta dan \$ 30 djuta pada tahun 1964.

Sementara itu telah diketahui oleh masyarakat luas, bahwa hutang kita pada luar negeri, seluruhnja berdjumlah \$ 2.408 djuta, terbagi atas :

\$ 1.036 djuta yang dipergunakan untuk keperluan militer

\$ 1.175 djuta untuk keperluan sipil

\$ 197 djuta hutang djangka pendek.

Hutang² yang kita sebut tadi pada tahun 1966 harus sudah mulai dibajar kembali berupa tjtjilan dan bunga. Kewadajiban membajar kembali ini akan sangat mempengaruhi neratja pembayaran kita didalam tahun 1966 ini.

Peladjaran yang dapat kita tarik.

Peladjaran apa yang dapat kita tarik dari sadjian angka² yang kita sebutkan tadi.

1. Didalam mengedjar tudjuan revolusi, kepentingan ekonomis dikorbankan untuk mentjapai tudjuan² politis. Penggunaan hampir 50% dari hutang luar negeri untuk keperluan militer, adalah keputusan politis.
2. Pengeluaran negara yang men'ngkat sedjak 1960 terus-menerus sampai 1965 adalah untuk mengedjar tudjuan politis, mula² Trikora, kemudian disusul dengan Dwikora.
3. Penerimaan negara yang sebagian besar direntjanakan akan berasal dari perusahaan² negara, tidak dapat dilaksanakan. Pajak penerimaan yang berasal dari barang² yang didatangkan dari luar negeri, makin lama makin merosot, berhubung makin menurunnja export.

NERATJA PEMBAJARAN INDONESIA.

(didalam djutaan \$)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965
Neratja perdagangan dan jasa	— 67	— 533	— 277	— 255	— 191	— 207
Capital inflow (net)	163	365	109	115	105	50
Defisit	96	— 168	— 168	— 142	— 81	157

Berlainan dengan kekurangan rupiah, kita tidak dapat mentjetak dollar. Oleh karena kekurangan didalam neratja perdagangan dan neratja djasa-djasa,

4. Pembiajan aparat Pemerintah jang terlalu besar merupakan sebagian besar dari pengeluaran negara, jaitu tidak kurang dari 50%. Dengan sendirinja tidak banjak tinggalnja untuk membiajai pembangunan. Didalam tahun 1965, pembangunan hanja merupakan 15,3% dari seluruh budget.

5. Bagian dari kredit luar negeri jang dipergunakan untuk keperluan sipil, tidak diperlukan untuk projek² jang langsung memberikan manfaat kepada rakjat dan membangun atau merehabilitir aparat produksi kita (Asian Games menggunakan \$ 12,5 djuta).

Pendirian projek² ekonomis kebanjakan ditentukan oleh pertimbangan politis pula.

Saran² didalam kebidjaksanaan ekonomi waktu jang akan datang.

Saran² mengenai kebidjaksanaan ekonomi.

Kesukaran ekonomi pada waktu² jang lampau, tidak hanja terletak dibidang ekonomis tehnis, tetapi kebanjakan dibidang ekonomis politis dan ekonomis psychologis.

Oleh karena itu, tindakan² jang akan diambil, kalau hendak mengenai sasarannja, haruslah menjangkut bidang psychologis, politis dan tehnis.

Bidang psychologis ekonomis.

Sampai sekarang telah didjalankan pembersihan jang giat didalam aparat² politik, seperti MPRS, DPRGR, departemen². Anehnja didalam aparat ekonomi tidak kelihatan ada kegiatan pembersihan.

Bidang ekonomis politis.

Pengeluaran Negara pada waktu jang lampau banjak dipergunakan untuk tudjuan² politis. Sekarang haruslah diadakan penelitian jang seksama, apakah

pengeluaran² politis itu dapat dipertanggung-djawkan. Batu udjiannja ialah pengeluaran² itu langsung menambah ketahanan ekonomi kita apa tidak. Kalau tidak menambah ketahanan ekonomi, hapuskan sa-pengeluaran² itu.

Bidang ekonomis tehnis.

1. Anggaran Belandja Negara harus disjahkan oleh DPRGR sebelum budget jaar ABN itu mulainya. Didalam penerimaan dan pengeluaran Negara haruslah disebutkan semua penerimaan dan pengeluaran.

2. Sedikitnja penerimaan Negara djanganlah semata-mata ditjari didalam aparat perpadjakan, jang semata-mata terlalu ketjil untuk mendjalankan tugas nasional. Setjara politis, padjak harus mendapat dukungan dari lembaga² politik jang tertinggi, seperti MPRS dan DPRGR.

3. Hutang luar negeri jang diterima haruslah semata-mata dipergunakan untuk merehabilitir, menstabilkan perekonomian kita dan untuk kombat inflasi. Daripada dipergunakan untuk membeli helikopter (untuk mengangkut periwisatawan ke Pulau Irian Ratu), Jetstar dan pesawat terbang Dornier (untuk memperkuat fleet Garuda), lebih baik dipergunakan untuk membeli pesawat² terbang untuk penerbangan dalam negeri.

4. Segera susun stabilitasi program jang menentang dengan tegas tindakan² apa jang akan diamati dibidang moneter, fiskal, perdagangan luar negeri, harga, gadji pegawai, produksi.

Penutup.

Pada waktu jang lampau doktrin dari „Revolusi jang belum selesai” dipergunakan sebagai dalih dan penjelewengan dan pemborosan se-akan² sebagai Batara Kala, jang meminta sesadji jang tidak ahenti²nja, Doktrin ini harus kita tindjau kembali.

Djakarta, 9 Mei 1966

P. T. TUNAS RAYA

Djalan Paletahan no. 9

T J I R E B O N.

Import & Export dan Perdagangan Umum

BEBERAPA PANDANGAN MENGENAI KEBIDJAKSANAAN EKONOMI

Oleh : Soetanto.

Pendahuluan :

Kebidjaksanaan ekonomi sebelum 1959 lebih menekankan pada pure economies yang mengabaikan ekonomi liberal. Undang² Dasar 1945 pasal 38 kurang mendapat perhatian, ekonomi tetap dikuasai oleh modal asing.

Sedjak 1959 tekanan lebih diletakkan pada socio-struktural policies, seperti pengganjangan kolektif diseluruh dunia, nasionalisasi perusahaan² asing, landreform, projek² Nation-dan Character Building. Persoalan² pure economies (yaitu peningkatan per capita produksi, stabilitas, efisiensi dan keadilan) kurang mendapat perhatian. Tidak diperhatikan, bahwa resources dalam ekonomi itu terbatas tersedianja. Makin banyak tenaga human dan non human resources yang digunakan untuk tujuan² politik, makin sedikit yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan² yang lain.

Berdasarkan fakta², seperti perkembangan jumlah uang yang beredar, perkembangan harga², merosotnja ekspor, keadaan djalan², keadaan public transportation dan telekomunikasi, pengurangan pegawai dan buruh dan sebagainya, tiap orang yang objektif akan menarik kesimpulan, bahwa Ekonomi Terpimpin yang dilaksanakan hingga sekarang ini, menunjukkan kegagalan total.

Karena itu diperlukan re-orientasi. Dalam pasal 33 UUD '45 dan strategi Dasar menurut Dekon. Menurut yang terakhir ini kita sekarang berada dalam tahap nasional-demokratis, artinja pengaruh modal asing dari manapun datangnja harus dikikis habis dan feodalisme (yaitu pemilikan tanah² besar oleh tuan² tanah) harus diakhiri. Direct foreign investments harus dinasionalisir; indirect foreign investments, seperti pindjaman² dan production sharing, dalam mana decision making tetap berada dalam tangan Indonesia tetap dapat dipertahankan; landreform harus dilaksanakan setjara konsekwen.

I. Beberapa pandangan umum yang tidak sesuai dengan pandangan ekonomis.

Dalam masyarakat kita diantara pemimpin² dan partai² terdapat pandangan² (maupun jg dinjatakan setjara explicit atau tidak, tetapi dapat disimpulkan dari tindakan² dan utjapan² mereka) yang tidak sesuai dengan pandangan ekonomis. Antara lain dapat disebut hal² dibawah ini :

a). Kerap kali kita berchajal dalam das Sollen dan mengira bahwa manusia Indonesia itu sepi ing pamrih dan bergotong rojong. Apakah dalam bidang ekonomi gambaran homo

economicus yang berhitung berdasarkan private rationality tidak lebih dekat pada kenyataan? Untuk dapat keuntungan orang² tidak segan² untuk menerima suap, mentjuri, menjahajgunakan kekuasaan, menggunakan sembojan² yang muluk² untuk menutupi tindakan² untuk kepentingan sendiri, kliek sendiri, partai sendiri. Jang kita lihat bukan kegotong rojongan, ketjuali dalam golongan² ketjil. Jang kita lihat adalah djegal²an, gon-tok²an. Kita membutuhkan pemimpin² yang dapat berpikir berdasarkan social rationality, jng kami yakin pasti ada di Indonesia. Akan tetapi kita boleh menutup mata, bahwa manusia Indonesia pada umumnya, dalam bidang ekonomi, tidak sepi ing pamrih.

Kalau hal ini diakui setjara explicit, maka hal itu dapat diperhitungkan setjara explicit pula. Ini menjangkut soal open management, auditing, penegasan siapa yang tanggung djawab untuk satu tindakan (djadi djangan masing² mengelakkan tanggung djawab, karena keputusan diambil oleh suatu panitya), hindarkan pemusatan kekuasaan yang terlalu besar dalam satu tangan, ada djabatan² yang tidak dapat dirangkap dalam satu tangan, adanja sanksi² dan sebagainya.

b). Dalam ekonomi tidak ada miracles, tidak ada hal² yang adjaib. Ekonomi tidak bisa dibangun dengan pidato², sumpah², resolusi² dan sebagainya. Salah pula sangkaan, bahwa seorang sardjana ekonomi dengan satu peraturan sadja akan dapat memetjahkan segala persoalan ekonomi. Itu semua bisa membantu, akan tetapi yang pokok dalam ekonomi adalah kerdja keras, tekun, teliti, efficient.

Ini menjangkut soal incentives (perangsang²) materiil maupun spirituil, dan tjonto baik dari pimpinan Bapak kentjing berdiri, anak kentjing berlari².

c). Nation dan character building itu penting, dan kalau ada resources tersedia bisa ditjapai dengan patung², menara², gedung² megah. Akan tetapi, kalau resources memang tidak tjukup, apakah harga diri dan kebanggaan nasional itu tidak dapat dipupuk dengan projek² yang sekaligus meningkatkan produktivitas ekonomi? RRT bangga karena lima tahun dapat membangun 155 pabrik. Korea Utara bangga karena bisa bikin sandang dari batubara.

Apakah kita tidak akan bangga, kalau dalam 5 tahun misalnja dapat membangun 100 pabrik dan dapat berdiri dalam bidang ekonomi?

- d). Dalil pokok dari Marx adalah, bahwa cultural superstructur (jaitu tata-hukum, kebudayaan, moral, kesenian dsb) ditentukan oleh perkembangan dari productive forces. Karena itu development dari human dan non-human resources harus mendapat prioritas pertama, djika kita hendak membangun masyarakat jang adil-makmur, materiil dan spirituil. Tidak mungkin masyarakat demikian itu dipikirkan, kalau human dan non-human resources masih underdeveloped. Resources development berarti human investments, penggalan kekajaan potensiil jang ada dalam alam kita, capital accumulation untuk menambah produktivitas. Kalau ini tidak diperhatikan, maka tjita² sosial-politik hanja merupakan chajalan belaka.
- e). Baik buruknja suatu departemen, djawatan, kantor dsb. tidak dapat diukur dengan djumlah pegawainja, dengan kenjataan bahwa lembaga itu dikuasai oleh partai sendiri, dengan ber-belit²nja peraturan² jang dikeluarkan atau dengan kesempatan jang diberikan untuk meminta uang suap.
- Ukuran jang tepat adalah effectiveness dan efficiency. Effective berarti mengenai sasaran. Efficient berarti menjapai sasaran itu setjara hemat dan tjepat. Effective tetapi inefficient berarti pemborosan resources jg terbatas itu. Ineffective berarti impotent. Sebagai tjontoh : Kalau misalnja perizinan ekspor dan pelaksanaannja dapat diatur dengan lima lembar pormulir dan tiga tanda tangan (Kantor Urusan Ekspor, Bank Devisa dan Douane), maka tidak perlu ada 20 lembar pormulir dan tigapuluh tanda tangan. Tentu dengan tjara jang terachir ini lebih banjak kesempatan untuk meminta uang suap.
- f). Untuk menilai tepat-tidaknja suatu peraturan ekonomi, kita tidak melihat, apakah peraturan itu sesuai dengan textbook jang ditulis seorang profesor botak dari Harvard, atau apakah peraturan itu konvensional atau inkonvensional. Jang mendjadi ukuran adalah effectiveness jang efficient.
- g). Kalau lain² negara berhasil mengadakan ekonomi berentjana dan terpimpin, jang disentralisasikan setjara ketat, ini tidak berarti, bahwa hal ini djuga dapat dilaksanakan di Indonesia. Dalam negara jang daerahnja sangat luas dan terdiri dari beribu² pulau dengan ber-matjam² suku bangsa, dalam mana transport dan telekomunikasi antar daerah kurang lantjar, harus diberi otonomi jang luas pada daerah. Pemusatan pimpinan dan decision-making di Djakarta akan mengganggu kelantjaran ekonomi daerah, menimbulkan ketidakpuasan dan sukuisme. Otonomi tidak berarti federalisme Van Mook.
- h). Kebidjaksanaan dan social control jang tepat harus berdasarkan informasi² dan statistik² jang tepat dan up-to-date. Pengrahasiaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Belandja Devisa ternjata memungkinkan penghamburan kekajaan rakjat setjara tidak bertanggungjawab, dan pada achirnja menjerimpung pemerintah sendiri. Pengrahasiaan perkembangan djumlah uang jang beredar, ternjata tidak dapat menghentikan kenaikan harga² atau menghilangkan kegelisahan masyarakat jang disebabkan oleh inflasi.
- i). Tidak ada peraturan atau tindakan ekonomi jang dapat memuaskan semua anggauta masyarakat. Karena itu tiap tindakan ekonomi harus berpedoman pada kepentingan rakjat banjak dan perhitungan jang djujur mengingat kemungkinan² jang ada. Tiap petugasan akan mendapat kritik, tidak sadja karena tidak mungkin seluruhnja anggauta masyarakat dipuaskan, akan tetapi djuga karena tiap pendjabat jang betul² bekerdja, pasti kadang-kadang membikin kesalahan. Jang penting adalah bahwa kesalahan itu tidak dibuat dengan sengadja dan dengan maksud djahat, selalu dapat dikoreksi.
- Kesalahan jang paling besar adalah menghindarkan kesalahan dengan tidak bertindak, karena ini menjebabkan bottlenecks, kematjetan, backlogs dalam ekonomi.
- j). Kesalahan pengertian jang kerap kali terdengar adalah mengenai hubungan antara real economics dan ekonomi moneter. Misalnja dikatakan, bahwa ada projek-projek besar jang dibiajai dengan sumbangan-sumbangan swasta, sehingga tidak memberatkan keuangan Negara dan masyarakat. Terlepas dari kemungkinan, bahwa sumbangan² swasta itu mungkin datang dari kredit² Pemerintah atau dari menjelundupi pembayaran padjak, kalaupun misalnja seluruh sumbangan² itu merupakan tabungan² halal dari swasta itu, pernyataan demikian itu lebih bersifat juridis dan bukan ekonomis. Kalau dalam masyarakat misalnja ada 1.000.000 zak semen, dan itu semua digunakan untuk membangun patung², maka untuk projek² lain tidak ada semen lagi, apakah pembangunan itu dibiajai uang swasta atau Pemerintah. Jang penting adalah efficient allocation of resources untuk projek² jang penting bagi masyarakat banjak.
- k). Salah pengertian mengenai ekonomi dapat menjjerumuskan kita dalam salah kesimpulan dari pernyataan² jang benar. Tjontoh adalah sbb. : Men leeft niet van brood alleen. Dus ekonomi thok tidak tjukup. Ini benar, tetapi lalu ada jang menarik kesimpulan : Dus ekonomi tidak penting. Ini salah.

lah, karena : Zonder brood leeft men niet. Dan : The stomach cannot wait. Memang stomach dari pemimpin² gadungan tidak pernah menunggu, tetapi dalam ilmu ekonomi jang dipersoalkan adalah stomachs dari seluruh masyarakat. Salah pengertian disini, adalah sangkaan bahwa economic resources dalam ekonomi itu tidak terbatas. Kalau ini benar, djadi kalau kita hidup dalam Luilekkerland, waar de gebraden duiven ons in de mond vliegen, maka tidak perlu ada ilmu Ekonomi.

1). Sembojan jang banjak terdengar sekarang adalah "hilangkan exploitation de l'homme par l'homme". Teoritis jang dimaksud adalah bahwa produksi adalah hasil bersama dari semua jang kerdjasama dalam produksi itu. Kalau segolongan mengambil surplus untuk diri sendiri berdasarkan pemilihan alat² produksi materiil sedangkan surplus itu sebenarnja milik bersama, maka dikatakan bahwa ada exploitation de l'homme par l'homme. Karena itu dalam sosialisme, alat² produksi materiil supaja dimiliki negara atau koperasi, sehingga surplus itu mendjadi milik dari Negara sebagai wakil dari seluruh rakyat atau mendjadi milik dari seluruh anggota koperasi. Akan tetapi ini berarti bahwa surplus ini sebenarnja dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat atau seluruh anggota koperasi. Kalau surplus itu diselenggarakan dan digunakan untuk manfaat kapitalis² birokrat dalam pemerintahan atau pengurus² koperasi, maka tetap akan ada penghisapan manusia oleh sesama manusia, tidak lagi oleh tuan² tanah seperti dalam feodalisme, atau oleh kapitalisme² swasta seperti dalam kapitalisme, akan tetapi oleh birokrasi dan pengurus² koperasi tadi. Mungkin ini lebih djahat, karena diselubungi dengan sembojan² jang muluk², dan kerap kali dilakukan setjara rakus sekali, karena dipaksakan dengan penjalahan kekuasaan negara.

II. Pegangan² teoritis untuk Kebidjaksanaan Ekonomi Negara.

Djika kertas² karya jang dihasilkan Seminar Ekonomi ISEI, Seminar Ekonomi KAMI dan sarjana-sardjana ekonomi perseorangan, betul-betul dibatja, barangkali symposium ini tidak perlu. Pun tidak perlu didatangkan sarjana ekonomi dari luar negeri. Dibawah ini dikemukakan setjara singkat saran² teoritis, jang tidak baru dan tidak sensasionil, tetapi senyata-mata rasionil. Dalam keadaan pada waktu sekarang, pedoman² itu pasti tidak dapat dilaksanakan dengan 100%. Ini tidak berarti, bahwa pedoman² itu tidak penting. Kalau kita ketahu, bahwa Semarang terletak disebelah Timur dari Djakarta, kita akan mentjapainja dengan bergerak ke Timur. Ini bisa tjepat kalau ada kapal

terbang, dan lambat kalau hanja ada mobil jang tua dan djalannja rusak. Tetapi kita tidak akan sampai di Semarang dengan bergerak ke Selatan. Begitu pula masyarakat adil-makmur tidak dapat ditjapai dengan memboroskan resources jang terbatas untuk konsumsi berlimpah², dan peraturan² jang bersimpangsiur, saling menjerimpung dan irrasionil.

Dalam mengemukakan saran² itu dapat dipakai beberapa matjam sistematis, misalnja menurut pokok² pikiran teori ekonomi, jaitu pembangunan ekonomi, stabilitas, efficiency dan keadilan. Pokok² ini adalah inti dari berpikiran ekonomis dan harus dipegang dalam keadaan manapun dan sistem ekonomi manapun, ekonomi kapitalis, liberal atau terpimpin. Sistematis jang lain adalah menurut bidang² ekonomi, misalnja Keuangan Negara, Hubungan Ekonomi Internasional, Perbankan, Ekonomi Industri, Ekonomi Pertanian dsb. Sistematis jang pertama adalah lebih baik, karena sebenarnja pokok² itulah jang harus diusahakan dalam masing² bidang ekonomi itu. Mengenai masing² pokok itu dapat diberikan pegangan² sbb. :

- a). *Pembangunan ekonomi* : artinja peningkatan produksi per capita atau peningkatan produksi nasional jang lebih tjepat dari peningkatan jumlah penduduk.
 - (i). Dengan resources jang ada, tjapailah produksi jang maksimal.
 - (ii). Batasi konsumsi pada tingkat jang hemat tetapi sehat. Tekan capital consumption serendah²nja, dengan perawatan jang baik dari alat² produksi. Hindarkan impor konsumsi mewah.
 - (iii). Gunakan resources selebihnja untuk setjepatnja mengembangkan human dan non resources untuk meningkatkan produksi dalam periode kemudian.

Dalam pembangunan itu perlu diusahakan perubahan² struktural sbb. :

Pertanian harus diperluas, dikolektivisir dan dimekanisir. Industri harus madju lebih pesat dari pertanian, karena ini adalah inti dari industrialisasi. Industri berat (barang² produsen) harus madju lebih tjepat dari industri ringan (barang² konsumsi), karena ini adalah inti dari pembangunan. Sektor sosialis (negara dan koperasi) harus meningkat lebih tjepat dari sektor swasta, karena ini adalah inti dari sosialisme.

- b). *Stabilitas* : Untuk mendjamin stabilitas djangka pendek perlu diusahakan agar $(I-S) + (G-T) + (X-M) = 0$. Untuk mendjamin stabilitas djangka pandjang perlu diusahakan agar tiap periode inventasi meningkat dengan suatu persentase jang sama dengan perkalian dari propensity to save dan average productivity of capital. Langkah² jang dapat diambil untuk menudju kestabilan adalah :

- (i). Screening dari projek² investasi. Laksanakan hanya projek² yang betul² produktif. Tinggalkan atau atau tangguhkan projek² yang lain.
- (ii). Tingkatkan savings dari masyarakat. Untuk itu diperlukan incentives.
- (iii). Adakan penghematan yang selektip dalam pengeluaran² pemerintah. Untuk ini perlu research yang serius dan djudjur.
- (iv). Perbaiki pemungutan pajak, bea, tju-kai, keuntungan² perusahaan Negara.
- (v). Tingkatkan export. Ini sebenarnya inflatoir, akan tetapi hal itu segera dapat diatasi dengan melepaskan devisa untuk impor.
- (vi). Import planning yang selektip dan teliti, dan betul² dilaksanakan.

Mengingat besarnya elasticity of demand dan ketijlnja elasticity of output, maka untuk menjaga stabilita, penting sekali untuk menjaga jangan sampai money supply meningkat terlalu tjepat. Ini menjangkut soal monetary policy, fiscal, credit policy, debet management.

- c). *Efficiency* : Ini berarti pengetrapan dari prinsip ekonomi, jaitu tjapai suatu output tertentu dengan minimum inputs, atau dengan djumlah inputs yang ada, tjapai maximum output. Ini akan menjangkut soal organisasi management, cost accounting, incentives dll. Dalam masyarakat kapitalis djumlah dan djenis output ditentukan dengan berpedoman pada harga² dipasar, dalam sosialisme hal itu ditentukan dengan planning setjara ilmiah, akan tetapi efficiency itu tetap diusahakan. Ini tidak berarti, bahwa buruh harus ditindas ; mereka harus mendapat djaminan hidup yang lajak.
- d). *Keadilan* : Tiap orang yang bisa dan mau bekerdja berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang lajak, termasuk menabung untuk hari tua dan sekedar rekreasi. Orang yang tidak bisa bekerdja karena bukan kesalahannya wadjib mendapat bantuan. Perbe-daan income yang terlalu besar harus dihindarkan, a.i. dengan progressive taxes. Pajak atas pemilikan lebih berat daripada pajak atas income dari kerdja. Inflasi adalah bertentangan dengan keadilan, karena menghisap fixed income groups dan memperbesar income inequalities.

Sekianlah pegangan² pokok yang dapat diberikan oleh ilmu ekonomi, yang kami yakin akan diterima oleh setiap orang yang setjara djudjur ingin mengemban Amanat Penderitaan Rakyat.

Sudah barang tentu prinsip² itu untuk penge-trapannya harus disertai dengan research, kwantifikasi dan analisa dari realitas yang objektip kemudian harus dirumuskan dalam peraturan² dan rentjana² kerdja, dan pada akhirnya harus dilaksanakan dengan konsekwen dan djudjur.

²Sebagai tjontoh : Bagaimana meningkatkan export ? Selidiki potentialities, bottlenecks, kelemahan². Sederhanakan prosedur export. Djamin kontinuitas perusahaan² export, dsb. Selidiki akibatnja terhadap pembangunan ekonomi, stability dan keadilan ; usahakan efficiency dalam export. Bagaimana melaksanakan otonomi daerah ? Bagaimana hubungannya dengan resource mobilisation di daerah ? Bagaimana membagi hasil pajak antara Pusat dan Daerah ?

IV. P e n u t u p.

Menanggulangi kesukaran² ekonomi pada waktu sekarang tidaklah mudah. Ini terutama akan diakui oleh sardjana² ekonomi yang djudjur dan serious. Seperti djuga seorang dokter lebih tepat dapat menilai bahaya² yang dihadapi orang yang sakit, begitu pula pada seorang sardjana ekonomi dapat lebih tepat menilai bahaya² ekonomi yang kita hadapi. Banjak sekali persoalan² yang kita warisi dari masa lampau seperti gerilja politik, subversi, sabotase, hutang luar negeri yang sangat besar, djalan² yang hantjur, gunung yang gundul, aparat negara yang terlalu besar dan tidak efficiency, moril yang bedjat, rakjat yang ditjekoki dengan djandji-djandji muluk yang tidak realistis dan banjak lain-lain lagi. Maka dibutuhkan economic leadership yang djudjur dan disegani, yang setjara konsekwen dapat membimbing estjara rasional, berdasarkan social rationality, kearah sasaran² yang realistis dan tepat, dengan pembantu² yang dedicated dan ahli.

Dalam menentukan tracee baru, maka pokok² yang perlu diperhatikan adalah a.l. : Setiap saat resources yang tersedia untuk produksi itu terbatas. Djumlah penduduk kita meningkat terus. Lain² negeri ekonominja makin madju, kita tidak. Hutang kita diluar negeri ber-tumpuk². Karena itu djangan mem-buang² waktu dan memboroskan resources. Prioritas utama harus diberikan pada resources development untuk pembangunan ekonomi. Dalam segala kebidjaksanaan ekonomi harus diperhatikan effectiveness yang efficient, stabilitas dan keadilan. Sistem ekonomi harus sesuai dengan kekuatan² objektip yang ada, agar dapat membantu, dan tidak menghalang²i economic development.

Djangan terbelenggu oleh sembojan². Kupaslah sembojan² itu dengan kategori² ekonomi yang objektip, untuk melihat proporsinja yang wadjar.

Djakarta, 29 April 1966

BEBERAPA AKIBAT INFLASI DI INDONESIA

Oleh : Drs. Tan Goan Tiang

Pendahuluan.

Bahwasanja keadaan ekonomi Indonesia pada tahun² terakhir ini tidak menggembirakan adanja, dapat kita ketahui dari berbagai pernyataan pemerintah kita sendiri dan dari kupasan² jang dilakukan oleh para ahli ekonomi kita jang d muat dalam kebanyakan majalah dan surat² kabar dalam dan luar negeri.

Gambaran jang gamblang tentang gawatnja keadaan ekonomi negara kita pada dewasa ini, pada bulan jang lalu telah diberikan pula oleh J.M. Waperdam dib dang Ekubang Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam Statement Politik Ekonomi Dalam Negeri tertanggal 12 April 1966.

Dari Statement itu dapat kita ketahui bagaimana gojahnja send.² Ekonomi negara kita pada dewasa ini.

1. Export.

Sumber penghasilan negara jang utama ialah export telah merosot djumlahnja dari \$ 750 djuta samapai \$ 450 djuta setahunnja, sehingga dengan demikian mentjapai (an a.l t.me low level) tingkat jang terendah sedjak Republik Indonesia setjara de facto dan de jure di akui sebagai negara jang merdeka dan berdaulat oleh dan dian.ara negara lain didunia.

EXPORT (termasuk minjak bumi)
(djuta US dollars)

Tahun	Ni.a. (dibulatkan)
1951	1.290
1952	930
1953	820
1954	890
1955	950
1956	880
1957	970
1958	760
1959	870
1960	800
1961	740
1962	660 470
1963	670 412
1964	540 430
1965	480 400

(tanpa
minjak
bumi)

Sumber : Biro Pusat Statistik R.I.
Keterangan Waperdam Ekubang didepan
DPR-GR 6-5-'66.

Karena export menunjukkan trend menurun di bidang import djuga mengalami akibat² buruk dari persediaan devisa jang makin berkurang, terlebih pada dewasa ini karena sebagian besar dari devisa itu harus digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran² bunga pindjaman dan pelunasan hutang kepada negara² lain. Untuk menutupi kesulitan² itu, pemerintah pada masa jang lalu melakukan import antaranja dengan sistim „deferred-payment” jang dalam bahasa Indonesia sehari artinja tidak lain dan

tidak bukan „penundaan pembayaran” alias „hutang” dalam djangka pendek dengan sjarat² jang biasanya menguntungkan pihak dengan bargaining position dan lebih kuat dan dalam hal ini ialah pihak negara kreditur.

Penghasilan export jang sudah rendah itu diper-sulit lagi untuk diperolehnja karena birokrasi prosedur export dan peraturan² tidak resmi jang mungkin merupakan incentives bagi para pedjabat atau petugas jang setjara langsung atau tidak langsung mentjampui pekerjaan export itu, akan tetap jang sudah pasti dianggap sebagai desincentives oleh para exportir sendiri.

Disamping itu daerah² penghasil devisa ialah daerah² jang memproduksi barang² export kurang turut menikmati dari paket devisa jang makin lama makin merosot djumlahnja, sebabnja pemerintah pusatlah jang menarik seluruh penerimaan devisa dan menggunakan devisa itu kemudian menurut sekehendaknja.

Pengangkutan dari daerah makin lama makin seret dan kurang teratur, bahkan didaerah² sendiri keadaan infrastruktur ada'ah amat parah, sehingga orang berkata dikebanjakan daerah luar Djawa „de weg is weg”.

Bukan hanya pendapatan dari export berupa devisa berkurang, djuga penerimaan negara dari pajak, tjukai dan retribusi² tidak menunjukkan gejala „ever onward” tetapi djustru meng'ikuti djalan „ever Re-treat”, djika dibandingkan dengan pengeluaran² jang dilakukan.

2. Defisit negara.

Jang ever onward adalah pengeluaran² negara sehingga timbul suatu escalated expenditure jang tertjerm.in pada makin meningkatnja defisit anggaran Belanda Negara jang makin lama makin menggelisahkan orang jang mempunjai sedikit pengertian tentang ekonomi. Dalam tahun lima puluhan defisit itu adalah kira² rata² 20% dari penerimaan. Dasawarsa berikutnja lebih meningkat djadi 100% dan akhir tahun 1965 defisit djadi 300% dari penerimaan atau dengan perkataan lain pengeluaran negara adalah kira² 4 kali lipat besarnya dari penerimaan. Tetapi rekord defisit (djika tidak diambil tindakan tepa) mungkin ditjapai tahun ini, sebab dalam triwulan pertama tahun 1966 pengeluaran sudah berdjumlah kira² Rp. 2.600,— djuta rupiah sedang penerimaan baru berdjum'ah kira² Rp. 300,— djuta, djadi defisit dalam triwulan pertama dalam tahun 1966 sudah besar dari defisit jang sudah amat besar dalam seluruh tahun 1965.

Untuk menutup defisit² itu dahulu oleh Pemerintah telah dikerahkan setjara non-stop mesin² Pertjetakan Uang Negara di Kebajoran, sehingga akhirnya persediaan kertas untuk mentjetak uang itu tidak mentjukupi lagi.

Inflasi hebat tidak usah terdjadi djika sedjak dahulu pemerintah memberi perhatian jang tjukup pada kehidupan ekonomi rakjat terbanjak, dengan misalnja mendjaga keseimbangan anggaran belandja dan mengadakan pengawasan jang hebat terhadap keuangan negara, serta menitik beratkan pada segi pendapatan daripada segi pengeluaran. Djagalah agar pengeluaran djangan sampai melampaui pendapatannya besarnja (zet de tering noor de nering) nistjaja banjak kegaduhan dapat dihindarkan. Ini berlaku untuk perorangan untuk perusahaan dan pula untuk negara.

Sedjak tahun 1957, pemerintah seolah-olah tidak memperdulikan prinsip ekonomi jang utama ini, usaha peningkatan pendapatan kurang difikirkan. Penerimaan padjak setjara relatif terhadap G.N.P. tiap tahun berkurang akan tetapi tidak ada usaha jang sungguh² untuk memperbaikinja.

P.N.²/P.N.N.² jang seharusnja merupakan salah satu sumber pendapatan negara jang penting, tidak memcnuhi harapan itu, akan tetapi terus dibiarkan djadi susu perahan oknum² jang tidak punja rasa tanggung-djawab, sehingga sekarang ini. Kebalikannja pengeluaran² terus meningkat dan dilakukan tanpa pertimbangan² ekonomi, seolah-olah sumber keuangan negara itu ontuitputtelijk besarnja. Kurang atau tidak diperhatikan pemeliharaan dengan baik djaring² djalan jang sudah ada. Demikian djuga kurang usaha memperpanjang djaring djalan dengan pembuatan djalan² baru agar dengan demikian dapat membantu kelantjaran distribusi barang² untuk rakjat tetapi jang diberikan perhatian adalah kemolekan² ibukota, hotel² buat turis jang berkundjung datang, pembuatan gedung² mewah, jang non-productive dan merupakan sarang korupsi dan manipulasi.

Tokoh² raksasa jang biasanya disebut departemen store tugasnja memang untuk turut membantu menstabilisasi harga. Akan tetapi riwayat departemen store dinegara² lain adalah berbeda dengan di Indonesia. Disana departemen store timbul sebagai gudang besar untuk menampung produksi jang sudah berlimpah² dan sekaligus untuk menolong rakjat banjak dalam pembelian barang² dengan harga jang rendah dan stabil karena dimungkinkan oleh economies of large industries. Ini sesuai dengan prinsip ekonomi. Kita membangun departemen store jang megah berukuran internasional sedang produksi aparat kita bekerdja hanja dengan kapasitas 20% dan kita mengalami inflasi hebat karena kekurangan barang. Apakah tidak lebih baik untuk menahan diri dan menunda pengeluaran jang begitu besar itu sehingga pabrik² kita menghasilkan barang² dalam djumlah jang berlimpah-limpah djuga.

Barulah departemen store dapat memenuhi fungsinya sebagai price stabilisator.

Biaja berdjuta dollar, menurut prinsip² ekonomi sebaiknya dipakai dulu untuk meningkatkan produksi demi Ampera. Urgensi untuk usaha itu sebenarnya djuga tidak ada, karena pembangunan departemen store tidak termasuk Rentjana Pembangunan Nasional Semesta.

Pemerintah seolah-olah tidak merasa committed to the economy of the population asal bagi para pemerintah agung segala sesuatu tersedia, keadaan sudah dianggap beres.

Prinsip² ekonomi tentang keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, keseimbangan antara permintaan dan produksi barang² antara investasi dan tabungan kurang memperoleh perhatian jang wadjar.

3. Inflasi.

Dengan demikian creeping inflation selama tahun lima puluhan dalam tahun² terachir ini telah berubah djadi galloping atau hyper inflation jang melanda sendi² ekonomi negara kita.

PENERIMAAN & PENGELUARAN NEGARA DENGAN UANG JANG BERADA

(djuta rupiah)

Tahun	Uang berada	Penerimaan	Pengeluaran	Defint
1951	3.328			
1954	11.117	11.789	15.391	3.602
1955	12.234	14.227	16.317	2.090
1956	13.394	18.452	20.015	1.563
1957	18.913	20.571	25.610	5.039
1958	29.366	23.273	35.313	12.040
1959	34.883	30.570	44.350	13.780 *)
1960	47.836	53.648	60.544	6.896
1961	67.600	62.218	85.22	26.304
1962	136.000	77.200	141.550	64.350
1963	265.000	153.300	334.460	181.160
1964	703.000	283.390	1.170.000	886.610
1965	2.982.000	1.173.000	2.700.000	1.527.000
1966	5.031	2.556	300	2.256 **)

Jan./Mrt.

Sumber : Biro Pusat Statistik R.I.
Keterangan Waperdam Ekubang didepan DPR-GR tanggal 6 Mei 1966.

*) 25 Agustus 1959
uang kertas Rp. 1000 dan Rp. 500 djadi Rp. 10.— dan Rp. 5.—

**) Penurunan nilai Rp. 1000 lama Rp. 1.— baru.

Dari tabel² diatas dapat dibuat kesimpulan bahwa hingga tahun 1960 pertumbuhan uang berdjalan setjara „slow but sure” akan tetap setelah tahun 1960. masyarakat kita dibandjiri uang laksana kota Solo achir² ini dilanda bandjir Bengawan Solo karena kebobolan tanggulnja. Keadaan ekonomi jang tidak sehat ini jang sudah lama disinjalar pada berbagai kesempatan oleh para sardjana ekonomi kita, achirnja diteriakkan oleh para peladjar/mahasiswa kita dan membangkit hasrat konstruktif dikalangan luas untuk membendungnja. Ada pendapat bahwa inflasi itu tidak mengapa selama rakjat masih bisa beli makanan. Kuranglah djelas dari pernajaan tersebut apa jang dimaksud dengan inflation. Djika diartikan sebagai nilai inflation, atau repressed inflation, ialah suatu keadaan inflasi jang masih dapat dikendalikan oleh pemerintah, memang benar inflasi demikian tidak amat menghawatirkan, apalagi djika disertai

distribusi barang² kebutuhan pokok bagi rakyat banyak jang lantjar dan terdjamin djalannya.

Akan tetapi dalam keadaan runaway inflation jang seperti kita alami tahun² terakhir ini, pendapat bahwa inflasi tidak mengapa selama rakyat masih bisa beli makanan, adalah suatu *contradictio in terminis*.

Runaway inflation adalah akibat daripada extensive excess demand, jang timbul karena flow of goods jang kurang besar dan jang mengakibatkan kenaikan tingkat harga jang spontan, sehingga paket konsumsi rakyat mentjiut. Djika dapat dipertahankan besarnya paket konsumsi rakyat termasuk bahan makanan, sehingga tidak ada extensive excess demand, dengan sendirinya tidak ada inflasi, sekalipun djumlah uang bertambah.

Akibat² inflasi dibidang ekonomi.

Inflasi jang hebat ini telah merusak seluruh kehidupan ekonomi Indonesia. Perbandingan antara harga barang dan tingkat upah berubah dengan megugik fihak kaum pekerdja, jang merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Inflasi mengakibatkan penurunan pendapatan riil negara, karena merajalelanja tax evaders. Struktur perpajakan tidak lagi dapat mengikuti maldistribution of income. Jang turut djadi mangsa taufan inflasi dalam public utilities, karena demi fungsi sosialnja tidak dapat mengikuti gelombang kenaikan harga, akan tetapi ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran mengakibatkan kerugian, disinvestment dan kelesuan kerdja jang chronis. Tidaklah amat mengherankan djika infrastruktur dalam keadaan inflasi hebat djadi kurang terpelihara bahkan menundukkan kemunduran-kemunduran jang merupakan merintang usaha² perbaikan kehidupan ekonomi. Private savings jang diperlukan dalam djumlah besar untuk menanggulangi inflasi tidak dilakukan bahkan gejala disavings dan capital consumption timbul sehingga memperbesar flow of money, mempertjepat the velocity of money dan meningkatkan inflasi.

Beaja produksi dalam negeri meningkat dan dengan demikian cost price barang² export djadi lebih tinggi tingkatnja dari pada harga dipasar dunia, jang mengakibatkan disparitas harga dan stagnasi dalam bidang export. Kematjetan export berarti pengurangan penerimaan devisa jang amat diperlukan untuk import investment goods, spare parts dan bahan² mentah untuk memperbesar real national output dalam negeri, sedang salah satu syarat untuk menumbangkan inflasi adalah pembesaran real national output.

Dibidang mental bukan hanja kehidupan ekonomi dirusakkan oleh inflasi akan tetapi jang lebih mengawatirkan adalah kerusakan mental jang diderita oleh masyarakat kita. Inflasi membagi masyarakat jadi dua bagian : disatu fihak the fixed earners dan pengusaha² ketjil jang makin lama makin mundur real incomenja dan difihak lain kaum pengusaha² besar penerima lisensi² istimewa, OKB, tjatut jang menikmati growth of wealth dalam waktu jang singkat dan tanpa dibebani pajak jang sewadjarnja. Bagian jang pertama makin lama makin melarat, sedang bagian jang kedua makin makmur. Karena melaratnja

bagian pertama harus berakrobatik untuk memelihara rumah tangganya, sedang karena makmurnja bagian kedua dengan lenggang kangkung memelihara sekian banyak rumah tangga. Pada bagian jang pertama jang merupakan tulang punggung negara kita ialah pada laborforce (angkatan kerdja) kita disiplin kerdja berkendor dan kegairahan untuk bekerdja berkurang. Adjaran hidup „Bekerdjalah radjin, hiduplah hemat, sederhana dan djudjur” tidaklah menarik lagi.

Kepintjangan dan ketidakmerataan dalam pendapatan nasional membuat ketegangan² dalam masyarakat, jang kemudian dikobar-kobarkan oleh golongan PKI/Gestapu dengan adjaran kelasenstrydnja. Dengan mulut mereka andjurkan production approach dengan perbuatan² mereka andjurkan pemogokan, kerintjuhan dan kekatjauan dalam bidang produksi.

Karena melaratnja maka keteguhan iman djadi kendor dan mudah djadi mangsa adjaran² materialistis atheistis. Lembaga² sosial dan keagamaan jang biasanja menabung dan menjimpan dana² kesedjahteraan atau dana bantuan untuk menolong para anggauta mereka dalam keadaan darurat, tidak lagi dapat berbuat banyak karena nilai riil tabungan/dana mereka berkurang terus menerus.

Orang tidak lagi suka menabung, sekalipun sedjak dipangkuan ibu sudah diadjarakan untuk bekerdja keras dan radjin, berhidup hemat dan djudjur, muda menabung tua terlindung. Tidak sulit untuk dimengerti mengapa orang tidak suka menabung dalam keadaan inflasi. Djumlah nominal uang jang ditabung bertambah, tetapi nilai uang itu makin lama makin berkurang. Misalnja : Dalam tahun 1951 teman saja mengadakan tabungan berupa polis studiverzekering untuk anaknja jang pada waktu itu berumur 3 tahun, dan menurut perhitungan dalam tahun 1966 dan sudah masuk di Universitas dan berdasarkan tingkat harga tahun 1951 memerlukan beaja setahunnja kira² Rp. 2500,—.

Direntjanakan anaknja itu memerlukan 6 tahun untuk menjelesaikan studinja dan dengan demikian ia mengadakan studi verzekering sebesar Rp. 15.000,— dengan premie kira² Rp. 100,— sebulan sedjak tahun 1951. Dalam tahun 1951 gadjinja Rp. 1.000,— sebulan dan ia dapat menabung Rp. 100,— sebulannja asal ia hidup hemat dan ia dengan setia membayar premienja. Achirnja pada tahun 1966 ia dapat menarik hasil tabungan jang ia telah lakukan dengan penuh pengorbanan itu. Ia menerima Rp. 2.50 uang baru sedang untuk mengambijnja dari perusahaan asuransi ia harus mengeluarkan Rp. 10,— uang betjak.

Menabung jang merupakan usaha terpujdi sebelumnya djadi sesuatu jang ditjemohkan karena inflasi. Tragiknja adalah, djustru dalam keadaan inflasi orang harus menabung banyak malahan ! Oorang jang tiap hari radjin masuk kantor dan melakukan pekerdjajannja dengan sungguh² dan hanja hidup dari gadji jang diterima tiap bulan, sebenarnja merupakan orang jang terpujdi dan dalam non-inflation period setelah

selesai masa dinasja akan diberhentikan dengan segala hormat dan pujian. Tetapi orang sedemikian dalam keadaan inflasi akan mati berdiri, mati konjo. Orang yang tidak d'udjur yang dapat men'alah gunakan kedudukannya dengan menerima uang² sogokan, orang yang lebih suka mengobjek, menjatut di luar will be better off dari pada pegawai yang setia dan radjin, dalam keadaan inflasi.

Karena pendapatan dari pekerdjaan yang pegawai itu lakukan dengan setia dan radjin, tidak mentjukupi maka achirnja pada kebanyakan orang kehairan dan kesenangan untuk melandjutkan pekerdjaan itu berkurang dan mungkin hilang sama sekali. Inflasi telah membuat orang yang djudjur djadi hantjur, sedang orang yang pandai bermanipulasi, berkorsup dan bersilat untuk memperoleh lisensi² istimewa, pendek kata orang² yang tidak djudjur djustru djadi makmur. Lisensi istimewa diberikan karena saluran export atau import telah matjet karena inflasi, tetapi lisensi istimewa djustru menyebabkan negara dirugikan dan orang yang menerima itu djadi kaya mendadak. sebab sehe'ai kertas lisensi istimewa dapat dilete-go, dipergunakan dengan memberikan keuntungan beratus djuta rupiah, atau ka'au ia berusaha sendiri dapat memberikan laba yang lebih besar lagi mungkin bermilijard rupiah. Keuntungan yang begitu mudah diperoleh membuat ia mendadak djadi kaya dan kurang menghargai nilai uang dan martabat sesama manusia. Tidak lagi pedoman hidupnya zuinighoid met vlijt, atau arbeid adelt, dan eenvoud is het ken merk van het ware, tetapi berfoja-foja menghamburkan uang dan kehidupan yang amat mewah yang diinginkannya. Ia berfikir bahwa dengan uangnya ia dapat berbuat segala sesua'au, dan memang ia memperoleh mangsa²nia yang ia perlukan untuk perbuatan²nja yang asosial dan amoral. Karena pendapatan yang tidak tjukup tiap kesempatan yang baik dan yang tidak baik digunakan oleh para pegawai dan petugas untuk menambah pendapatan, mereka agar dapat mempertahankan keseimbangan kendil dirumah.

Djasa² yang mereka harus berikan tidak lagi dilakukan dengan baik dan dengan ich'as. Ditoko-toko tidak lagi de klant is koning, pembeli seolah-olah harus mengemis untuk memperoleh barang di djalan² raja berbagai social taxes mendjadi penghambat pengangkutan dan menaikkan harga barang² yang sudah tinggi itu, bag' beberapa petugas pengadilan kedua mata Vrouwe Justitia tidak lagi tertutup rapat dan timbangan yang dipegangnja tidak lagi in equilibrium tetapi miring ketempat yang diganduli uang.

O.K.B.²/O.K.M.² karena cultural-lag yang melekat pada dirinja, mengkompensir itu dengan kehidupan mewah yang sangat ditondjol-tondjolkkan.

Orang yang tidak kuat imannja mudah sangat terbawa oleh demonstration effect kemewahan itu. Bukan perhatian, mawas diri dan kesederhanaan yang djadi pedoman hidup akan tetapi kemewahan tanpa memandang bagaimana pembejaannya.

Karena kesulitan² hidup sehari sebagai akibat inflasi hebat kesadaran moral djadi lemah dan banyak yang tidak dapat menahan diri dan melakukan pelanggaran pelanggaran terhadap norma² susila dan pidana.

Masalah gelandangan, masalah pelatjuran, penipuan, perampasan dan perampokan dan perbuatan kriminal lainnya menunjukkan ketjendungan meningkat.

Segala manipulasi, korupsi dan gangguan keamanan merupakan unsur² kenaikan biaya dan harga, sehingga memperbesar lagi pengeluaran dan membumbungkan spiral inflasi, yang pada gilirannya menambah hasrat untuk ketjurangan dan kedjahatan.

Kemauan ingin-lekas-kaja tanpa memperdulikan tjara ha'al atau haram mengifektir kehidupan masyarakat dan gejala desintegrasi dan demoralisasi tampak baik di kehidupan ekonomi, kemasjarakatan maupun di bidang kehidupan mental. Suasana demikianlah yang diinginkan oleh golongan PKI/Gestapu untuk dapat melaksanakan programnja yang bersifat teroris dan atheisistis.

Maka usaha penumbangan inflasi harus memperoleh perhatian terus menerus. Inflasi hebat mengertjaukan segala perentjanaaan pembangunan ekonomi dan menghambat bahkan menjauhkan kita dari tjita² pembangunan masyarakat Pantjasila yang adil dan makmur.

5. Tracee baru.

Timbul sekarang pertanjaan bagaimana melawan inflasi yang hebat dan yang sedang berketjamuk di negara kita sekalipun tiga kali diadakan tindakan moneter yang drastis.

Pada pekan tjeramah dan seminar soal² ekonomi dan keuangan yang diselenggarakan dari tanggal 10 s/d 20 Djanuari 1966 oleh sebagian anggotaa Angkatan 66 ialah Mahasiswa² Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang tergabung pada Kasatuan Aksi Mahasiswa Indonesia disusun suatu pernyataan yang antaranja menjarankan agar inflasi ditanggulangi setjara bertahap tanpa membebani Rakjat ketjil.

Inflasi adalah gejala yang biasanja digolongkan dalam bidang Ekonomi moneter dan yang merupakan suatu phenomena berbahaya yang dapat menghantjurkan seluruh sistim ekonomi. Inflasi timbul karena terganggunja keseimbangan antara permintaan dan penawaran kredit dan barang. Tiga hal yang penting harus diperhatikan :

- a. volume, arus dan arah barang.
- b. volume, arus dan arah uang.
- c. keadaan mental/psychologis masyarakat.

Setjara berangsur dalam waktu paling lama 3 tahun melalui perentjanaaan yang tepat dan pelaksanaan yang berdisiplin keras dipulihkan keseimbangan antara arus barang dan arus uang. Keseimbangan ini telah amat terganggu oleh run away inflation dimasa lampau.

ad a. Arus dan volume barang terutama barang konsumsi bagi kebutuhan primer dan bahan baku serta spare parts alat² produksi harus

diperbesar setjara berentjana dan teratur. Arus barang jang telah ditingkatkan itu harus diarahkan melaui saluran² distribusi jang effisien, djudjur dan tjekatan sehingga dapat mengenai sasarannja baik d.t.ndjau dari sudut proporsi, lokasi maupun spasi waktu. Pengawasan jang tjermat diperlukan sangat, agar effektivitas dan efisiensi d.distribusi tidak ter-tekan dan terlambat oleh berbagai djenis bottlenecks dibidang-bidang pengangkutan birokrasi, perbankan dan keamanan.

Bidang² strategis bagi penguasaan flow of goods adalah bidang **Perdagangan dan perentjanaan**. Bidang perdagangan jang meliputi import, export, perdagangan dalam negeri dan penjajuran bahan² pokok harus berdjalan dengan lantjar aman, efisien dan efektif, sesuai dengan perentjanaan jang telah dibuat. Maka tadi disebut sebagai bidang strategis kedua bagi penguasaan flow of goods adalah bidang perentjanaan. Perentjanaan atau planning adalah suatu tindakan rasional berdasarkan data² jang realistis. Planning bukan daftar keinginan jang akan disodorkan kepada Sinterklaas. Prinsip ekonomi tidak mengenal miracles berupa orang sinterklaas atau rumus tafeltje-dek-je. Sering dikatakan bahwa negara kita Indonesia ini fabelhaft Reih, dan dengan demikian orang suka lupa alam realitas ekonomi Indonesia dan melarikan diri ke alam fabel jang tidak mengindahkan prinsip² ekonomi. Sjukur achirnja angkatan '66 bangkit dan membangunkan dari alam mimpi megalomani. Bidang perentjanaan harus dipimpin oleh orang² jang realistis jang dapat menjusun prioritas² nasional setjara rasional berdasarkan resources jang tersedia. Penentuan rentjana harus berdasarkan prinsip² ekonomi semata-mata, demi tertjapainja tudjuan² output jang optimal dengan resouces jang tersedia.

Penentuan rentjana harus berdasarkan prinsip² ekonomi semata-mata, demi tertjapainja tudjuan² output jang optimal dengan resouces jang tersedia. Bidang perentjanaan harus prasaran mental, sosial dan ekonomi. Dalam djangka pendek concerted effort itu ditudjukan pada peningkatan produksi pangan-sandang, bukan dengan pembangunan pabrik² baru akan tetapi dengan mengutamakan penggunaan sepenuhnya kapasitas pabrik² jang sudah ada. Sekaligus dengan peningkatan produksi sandang-pangan, management, rehabilitasi dan extensifikasi pengangkutan di darat, laut dan udara memperoleh perhatian sepenuhnya.

Berhubung dengan rentjana peningkatan produksi dan rehabilitasi infastruktur, bidang perentjanaan harus mendjamin konsistensi antara import dan kebutuhan² produksi.

b. Volume arus dan arah penggunaan uang harus dikendalikan oleh Rentjana Moneter jang

meliputi bidang keuangan dan perbankan chususnja Kementerian Keuangan dan Bank Sentral. Kedua badan terachir ini harus menjusun anggaran moneter jang realistis, menjelenggarakan tax reform mengusahakan rescheduling hutang dan memperoleh kredit² baru tanpa ikatan dari luar negeri. Baik Kementerian Keuangan maupun Bank Sentral harus mendjamin bahwa penggunaan uang rupiah dan devisa benar² sesuai dengan prioritas nasional jang terdjamin pada rentjana jang telah disusun.

Untuk mensukseskan penanggulangan inflasi maka ke-empat bidang ini (perdagangan, perentjanaan, keuangan/anggaran/iuran negara, bank sentral) bukan sadja masing² memerlukan pimpinan jang tepat, melainkan pimpinan dari ke-empat bidang ini harus merupakan satu team jang serasi, jang terdiri dari orang² ahli dalam bidangnja, rajin, diudjur dan sederhana hidupnja, patriot pantjasilais jang sedjati dan tidak mempunjai vested interest.

Pimpinan dari ke-empat bidang ini sebaliknya disatukan dalam suatu **Dewan Stabilisasi** atau Dewan Finek jang dipimpin oleh seorang anggauta Presidium jang berwenang. Dengan demikian terdjamilah unity of command jang amat diperlukan dalam masa stabilisasi ekonomi dan tertjegah timbulnja kesmpang-siuran. Untuk menembus bottlenecks dapat diadakan crash program oleh team² adhoc jang dikoordinir oleh Pimpinan Perentjanaan.

ad c. Keadaan mental/psychologis masjarakat merupakan tugas jang tidak kurang pentingnja bagi suksesnja usaha penanggulangan inflasi, mungkin lebih berat daripada pengendalian flow of money and flow of goods, sebagaimana telah diuraikan diatas keadaan mental masjarakat telah dogojahkan dan misdirected oleh inflasi.

Distrust of money (ketidak pertjajaan terhadap nilai uang) dan expectation bahwa harga akan terus meningkat telah merobah pola penggunaan uang, orang berbelandja dipasar tidak lagi untuk satu hari, tetapi untuk satu bulan agar dapat mengantilipir inflasi dan biasanja djustru merupakan angin tambahan bagi api inflasi. Tiap usaha dibidang ekonomi untuk menanggulangi inflasi harus terasa sebagai bukti jang mejakinkan bagi masjarakat untuk merobah mental mereka. Indoktrinasi tanpa bukti jang njata dan terasa tidak akan besar manfaatnja untuk perobahan mental.

Austerity program (hidup hemat dan sederhana) adalah baik, untuk membantu menanggulangi inflasi akan tetapi akan djadi lebih baik djika disertai usaha² jang njata dalam

peningkatan national output percapita, dan peningkatan consumption function.

Maka demi suksesnja penanggulangan inflasi pengendalian flow of goods dan flow of money harus setjara synchroon disertai dengan campaign perobahan mental/psychologi, perobahan state of mind. Pemerintah dan penduduk setjara keseluruhan.

Dalam usaha² ekonomi jang tertudju pada kesedjahteraan penduduk sering orang lupa-kan sifat² mental dan fisik penduduk itu. Djika turut diperhitungkan maka jang dipentingkan biasanja hanja djumlah penduduk sadja atau tambahan penduduk rata² setahunnja. Didalam usaha menjusun kembali sendi² ekonomi Indonesia berdasarkan prinsip² ekonomi sebaiknja didasarkan atas penge-tahuan penduduk Indonesia jang lebih luas, dan mendalam terlebih didalam penjusunan rentjana pembangunan ekonomi untuk djangka pandjang agar hasil perentjanaan bisa djadi effectif dan bermanfaat.

6. Persoalan Penduduk.

Persoalan pangan di Indonesia berhubung erat dengan persoalan penduduk.

Djumlah produksi padi di Indonesia telah meningkat akan tetapi relatif tidak setjepat pertambahan penduduk sehingga sekalipun tidak ada gangguan² alam, tiap tahun kita akan mengalami kekurangan beras, djika tidak ada usaha untuk menaikkan sedemikian sehingga setjara relatif tambahan produksi padi tiap tahun melampaui tambahan penduduk.

PRODUKSI PADI (dalam ribuan ton)

Tahun	Djawa/Madura	Indonesia
1939	8.361	
1940	8.970	
1941	8.994	
1953	8.521	14.064
1954	9.263	15.061
1955	8.814	14.432
1956	9.146	14.619
1957	9.116	14.677
1958	9.544	15.344
1959	9.719	15.950
1960	9.657	16.860
1961	9.236	15.900
1962	10.000	17.215

Sumber : Statistical Pocketbook Indonesia 1963.

Demikian djuga djumlah rumah atau tempat penghunian (dwelling units) tiap tahun bertambah akan tetapi tidak setjepat pertambahan penduduk. Hal jang sama dapat dikatakan dengan alat² pengangkutan, sehingga amat terasa kesulitan² djika orang ingin berpergian atau mengirimkan barang. Ini berlaku djuga untuk produksi semua djenis barang, ketjualian untuk produksi uang. Tambahan produksi uang adalah satu²nja djenis produksi jang tiap tahun

hingga 1966 setjara relatif sangat melampaui tam- bahan penduduk, sehingga djumlah rupiah jang ada disaku orang Indonesia tiap tahun bertambah, akan tetapi djumlah barang jang dapat dibeli dengan rupiahnja itu tiap tahun berkurang.

Menurut Demographic Sample Survey tahun 1962 jang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik tambahan penduduk di Indonesia adalah kira² 2.3% setahunnja, sedangkan untuk tahun berikutnja diduga telah me- ningkat djadi kira² 3.0%, dengan perintjian bahwa pertumbuhan penduduk dipulau Djawa setjara relatif sedikit lebih rendah daripada dipulau-pulau lain.

Dengan asumsi sederhana bahwa pertumbuhan penduduk berdjalan setjara linear dan tingkat per- tambahan penduduk adalah 2.24% setahun dan ber- tolak dari hasil sensus tahun 1961, maka kita akan peroleh djumlah penduduk pulau Djawa dalam tahun 1966 adalah kira² 71 djuta orang. Djika tingkat per- tumbuhan untuk pulau Djawa pada tahun 1966 adalah 2.8%, maka tambahan penduduk di Djawa setahunnja setjara mutlak berdjumlah 2 djuta orang pada dewasa ini.

Dapat diharapkan bahwa djumlah tambahan pen- penduduk tahunan untuk pulau Djawa selama 15 tahun jang akan datang tidak akan kurang dari 2 djuta orang, bahkan mungkin sangat lebih dari itu.

Di Indonesia memang jang dihadapi persoalan pulau Djawa jang sangat padat penduduknja dan daerah luar Djawa jang masih kosong. Ditinjau dari berbagai sudut, penjebaran penduduk jang lebih me- rata akan lebih menguntungkan, akan tetapi berapa dan bagaimana penduduk dari pulau satu kepulau lain itu harus dipindahkannya? Persoalan ini ber- hubungan erat dengan persoalan transmigrasi. Hingga sekarang djumlah orang jang ditransmigrasikan dari pulau Djawa kepulau² lain tidak pernah melebihi 60.000 orang setahunnja. Berdasarkan pengalaman tiga puluh tahun timbul pertanjaan : Apakah realitis harapan untuk dapat memindahkan 2 djuta orang setahunnja pada dewasa ini, sedang pemindahan 5% sadja dari djumlah jang diinginkan itu tidak pernah terdjadi sekalipun telah dimunaskan, mubeskan, dipropagandakan, di-indoktrinasikan dan dikomando- kan oleh kepala Negara? Andaikata hal ini setjara teknis dapat dilaksanakan timbul pertanjaan : Apa- kah setjara budgettair dapat dipertanggung-djawab- kan beaja² jang harus dikeluarkan tiap tahun untuk melaksanakan transmigrasi paksa itu? Apalagi bila diingat bahwa beaja/transmigrasi percapita adalah kira² Rp. 10.000 uang baru sehingga untuk meminda- hkan 1 djuta orang sadja memerlukan beaja kira² Rp. 10.— milyar uang baru atau lebih seluruh djumlah anggaran belandja negara tahun 1966?

Dalam djangka 20 tahun jang akan datang setjara teknis tidak dapat dilaksanakan transmigrasi sebanjak 1 djuta orang setahunnja, sehingga dapat dikatakan bahwa transmigrasi bukanlah merupakan penyelesaian mutlak bagi persoalan penduduk dipulau Djawa dan transmigrasi tanpa persiapan² mental dan sosial psikologis akan menimbulkan persoalan² baru di- luar Djawa. Transmigrasi hanja dapat dibenarkan

dika bertujuan penjebaran tenaga² pembangunan dari tempat yang kelebihan ketempat yang kekurangan. Persoalan transmigrasi hanya merupakan bagian kecil dari persoalan hubungan penduduk dengan ekonomi. Dalam jangka pendek dengan data² technology dan penduduk seperti sekarang di Indonesia, transmigrasi tidak dapat mengatasi persoalan penduduk dan persoalan ekonomi dipulau Djawa khususnya. Usaha² pembatasan pertumbuhan penduduk pun dalam jangka pendek belum dapat diharapkan akan berhasil sekalipun dapat merupakan awal pekerjaan komplementer yang penting. Dalam hubungan persoalan ekonomi dan penduduk dipulau Jawa dapat dikatakan bahwa labor-intensive industry (perkapalan) intensifikasi pertanian merupakan pula usaha² tambahan yang amat penting akan tetapi bagaimana membeajainja. Dalam pembatasan kesulitan² ekonomi orang sering lupakan landasan demografi yang merupakan faktor strategis. Sering kemukakan bahwa untuk menjehatkan keadaan ekonomi pada dewasa ini antara lain perlu diadakan rasionalisasi pegawai negeri yang karena jumlahnya yang sangat besar dianggap sebagai salah satu sebab dari in-eficiency dan ineffectivity pekerjaan "ambtenaren" pada dewasa ini. Tetapi segera timbul kesulitan persoalan penampungan mereka yang akan non-aktifkan, sebab usaha rasionalisasi baru dapat dianggap mengenai sasarannya jika dapat membantu memberikan pertambahan national output. Rasionalisasi harus ditinjau setjara macro-ekonomi dan jangan sampai mengakibatkan pengangguran massal serta ketegangan social yang biasannya mengikutinja. Apakah Pemerintah dan swasta dapat „mentjiptakan pekerjaan dengan produktivitas yang tjukup tinggi untuk menampung korban rasionalisasi? Kreasi productive jobs berarti tambahan pengeluaran berupa investasi, yang harus dilakukan bukan hanya untuk korban rasionalisasi tetapi djuga untuk annual new entrants dalam labor force, potensi new entrants kira² 1½ djuta orang. Djumlah ini sudah tjukup memusingkan untuk menjediakan pekerjaan dengan tingkat produktivitas yang tinggi dalam jumlah yang memadai karena negara kekurangan modal. Berdasarkan komposisi umur hasil sensus penduduk tahun 1961 telah dibuat projeksi² penduduk hingga tahun 1976, dan menurut perkiraan projeksi penduduk dalam tahun 1966 (atau sekarang hingga tahun 1970) jumlah tjalon tambahan angkatan kerdja akan meningkat djadi rata² 2 djuta orang banjaknja dan sejak tahun 1971 sehingga tahun 1976 djumlah new entrants akan bertambah djadi rata² 3 djuta orang tahunnja. Demi keagungan sila² prikemanusiaan dan keadilan sosial Pantjasila dari sekarang sudah harus difikirkan dan direntjanakan job opportunities bagi pemuda/pemudi kita yang kelak akan turut menggabungkan diri dalam pembangunan dan penjuruan masyarakat yang adil dan makmur.

7. Penutup.

Dengan struktur umur yang chas bagi penduduk Indonesia seharusnya sedjak tahun 1961 sudah ada usaha² yang sungguh² untuk menjesuaikan pengeluaran negara dengan kebutuhan² yang tiap tahun bertambah dibidang pendidikan, kesehatan, perumahan, alat² pengangkutan dan infrastruktur dan kesedjahteraan rakyat umumnya.

Dalam penentuan prioritas national kepentingan kesedjahteraan umum harus diutamakan. Salah satu prinsip ekonomi adalah scarcity bukannya abundance. Sumber² ekonomi kita yang sudah tersedia berupa national output adalah terbatas banjaknja, dan tidak melajani sekaligus usaha² kenaikan tingkat kesedjahteraan rakyat, membuat bangunan² yang megah dan mewah tetapi non-efisien, non-productive dan non-ekonomis sifatnja, hidup berfoja-fojukan dan menjusun dunia baru.

Bertindak menurut prinsip² ekonomi berarti menggunakan sumber² yang scarce itu, sedemikian rupa sehingga diperoleh kenaikan tingkat kesedjahteraan rakyat banjak setinggi mungkin.

Kesimpulan.

1. Masa proloog Gestapu adalah masa kemerosotan kehidupan ekonomi ditanah air kita karena didalam pelaksanaan kebidjaksanaan ekonomi tidak dipegang teguh prinsip² ekonomi.
2. Nilai export turun hingga tingkat yang terendah sedjak tahun 1950. Sedang pengeluaran negara yang bersifat konsumtif telah meningkat sehingga akhirnya menimbulkan deficit pada anggaran belandja negara yang tidak ada taranja dalam sedjarah Republik Indonesia, akibatnja inflasi yang tadinja masih dapat dikendalikan telah berubah djadi pintu inflasi binal (runaway inflation) yang telah menggojahkan seluruh sendi² ekonomi, dan mental rakyat Indonesia.
3. Djalan keluar dari kesulitan ekonomi sekarang harus diarahkan pada pengendalian flow of goods dan flow of money. Perubahan mental rakyat Indonesia hanya dapat diharap djika ada tindakan² yang njata kearah perbaikan yang diambil oleh suatu team yang serasi dibidang finek.
4. Dalam pengendalian inflasi bidang perentjanaan yang berdasarkan fakta² yang realistik memegang peranan yang amat penting.
5. Pengertian yang luas, mendalam dan tepat hasil² sensus penduduk tahun 1961 merupakan suatu conditio sine qua non untuk kebidjaksanaan ekonomi.

Djakarta, 8 Mei 1966.

VARIABERITA/PENGUMUMAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI

1. PENANAMAN, PEMBELIAN, PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN KAPAS DAN SERAT LAINNJA

Penanaman kapas dan serat lainnja merupakan djaminan bagi suksesnja swasembada sandang, perlu segera diambil tindakan² pembelian dan pengolahan kapas hasil tanaman rakjat setjara teratur dan memberikan perangsang untuk mendorong perkembangan penanaman kapas dan serat² lainnja.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan Instruksi Bersama Deputy Menteri Perindustrian Tekstil tgl. 9 Mei 1966,

No. 02/Inst/De. M/V/65.

No. 02/SDYM/Sk/66.

telah diinstruksikan kepada semua Kepala Dinas/Djawatan/Inspeksi Perindustrian Dati I seluruh Indonesia untuk :

- Mengkoordinir pembelian, pengumpulan dan pengolahan kapas hasil produksi dalam negeri;
- Dalam melaksanakan koordinasi tersebut bekerjasama dengan instansi² lainnja yang berkepentingan.

Kepada P.N. Kerta Niaga diinstruksikan untuk :

- Mengadakan pembelian/penampungan kapas hasil dalam negeri, dengan ketentuan, dikejualikan kapas hasil tanaman PPN - Serat, KOPTEXI dan OPS - OPS Tekstil.
- Didalam melaksanakannya agar bekerjasama dengan Dinas/Djawatan/Inspeksi Perindustrian Dati I yang bersangkutan.

Kepada semua perusahaan pemintalan kapas baik negara maupun swasta diinstruksikan untuk menampung/mengolah kapas hasil tanaman dalam negeri.

Penentuan djumlah kapas yang harus dibeli oleh masing² pemintalan ditentukan oleh Departemen Perindustrian Tekstil.

Instruksi Bersama ini mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 1966. ***

2. EKSPOR MINJAK KELAPA DAN BUNGKIL KELAPA DARI KEPULAUAN RIAU

Dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi tgl. 10 Mei 1966 No. 021/SK/V/1966 telah ditetapkan bahwa ekspor/antar pulau minjak kelapa, bungkil kelapa dan kopra dari daerah Kepulauan Riau dapat dilakukan oleh pengusaha² ekspor yang telah mempunyai Angka Pengenal/Pengakuan Antar pulau dan terutama yang berpengalaman dalam bidang i u.

Dalam Keputusan MENPERDAGKOP ini juga ditetapkan pentjabutan Keputusan Kuasa Menteeeri Perdagangan Luar Negeri tgl. 3 Djanuari 1966 No. 001/MPLN/1/66 yang mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 1966. ***

3. PERTEMUAN KUNDJUNGAN KEHORMATAN KEPADA MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Selama Menteri Perdagangan dan Koperasi melakukan djabainnja hingga sekarang telah beberapa kali mengadakan pertemuan/mendapat kundjungan kehormatan ditempat di Gedung Kementerian Perdagangan dan Koperasi.

a. Dengan Kuasa Usaha Inggris
JAMES MURRAY

Dengan didampingi oleh Deputy Menteri Perdagangan Kol. Abdurachman dan Deputy Menteri Koperasi Majdjen. Achmad Tirtoscehro J.M. Menperdagkop Majdjen D. Ashari telah menerima kundjungan kehormatan Kuasa Usaha Inggris, James Murray bertempat di Kementerian Perdagangan dan Koperasi, pada tanggal 7-8 Juli 1966 jl.

Dalam kundjungan kehormatan tersebut telah dibicarakan kemungkinan untuk memperluas hubungan ekonomi/perdagangan antara Indonesia dan Inggris. Djuga mengenai kesediaan Inggris untuk membantu persiapan misi ekonomi RI yang akan ke Eropa pada permulaan bulan Djuni/Djuli 1966.

Menurut keterangan Kuasa Usaha Inggris, bahwa Pemerintah Inggris akan memberikan grant (bukan Kredit) kepada Pemerintah Indonesia sejumlah £ 1 000 000 dan diharapkannya agar sebelum keberangkatan misi ekonomi tersebut telah memberikan daftar perintjian dari pada kebutuhan yang hendak dimasukkan dalam rangka „grant” yang akan diberikan oleh Pemerintah Inggris tersebut.

Djuga dalam rangka „grant” tersebut Pemerintah Inggris ingin membantu/mendjamin kelanjutan perusahaan² perindustrian Indonesia antara lain Pabrik² Permintalan yang berada di

- Tjipadung (di Borilung) dengan 30.000 matapintal
- Sejang (di Magelang) dengan 30.000 matapintal dan
- Grati (di Pasuruan) dengan 30.000 matapintal

yang kesemuanya menggunakan mesin² dari pabrik Platt Brothers.

b. DENGAN DELEGASI G.P.E.I.S

Pada tanggal 10 Mei 1966 J.M. Menteri Perdagangan dan Koperasi Majdjen D. Ashari telah mengadakan pertemuan dengan Dewan Pimpinan Harian G.P.E.I.S. Dalam pertemuan tersebut hadir para Asisten Menperdagkop dan para GPEIS : Kho Tek Biauw, Hamizar Hamid B.A. Lie Tjan Lie dan Tan Heng Jan S.H.

Dalam pertemuan tersebut telah dibicarakan mengenai :

Perscalan ekspor dewasa ini jang kelihatannya lesu. Sehubungan dengan itu maka J.M. Menperdagkop mengharapkan supaya seluruh eksportir segera memulai kembali aktivitasnya. Selanjutnya oleh Menteri dinjatkan bahwa dalam waktu jangka pendek crash program ekspor akan diumumkan.

Menteri Perdagangan dan Koperasi mengharapkan dan menegaskan agar :

- a. semua eksportir memberikan bantuan dalam mengisi Statement Politik Ekonomi Waperdam EKUBANG baik khusus mengenai ekspor maupun setjara umum dalam rangka tugas-tugas KEMPERDAGKOP.
- b. mengadakan kerdjasama jang erat antara KEMPERDAGKOP sebagai policy-maker dan eksportir sebagai unit-unit pelaksana di Pusat maupun di daerah dan djuga di luar negeri.

Dalam pertemuan tersebut DPH GPEIS memberikan kesanggupan untuk memenuhi permintaan dan instruksi MENPERDAGKOP hal mana djuga diharapkan mendapat response dan partisipasi dari seluruh eksportir Indonesia.

Selain dari pada anggota DPH GPEIS, turut dir djuga Sdr. Scepertono S.H. Direktur Utan N.V. LADINDO di Amsterdam.

SCREENING DI KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Sebagai kelanjutan dari pada Team Penelitian dan Penertiban Pegawai Departemen Perdag-

angan jang lama, sehubungan dengan penjemputan Kabinet Dwikora dan perubahan susunan Departemen Perdagangan jang diintegrasikan dengan Departemen Koperasi kedalam Kementerian Perdagangan dan Koperasi, maka berdasarkan SK Menteri Perdagangan dan Koperasi telah dibentuk Panitia Pengamanan dan Penertiban Personil Kementerian Perdagangan dan Koperasi jang meliputi Departemen Perdagangan dan Departemen Koperasi.

Berdasarkan Instruksi Presiden/Pangti ABRI/PBR/Mandataris MPRS No. 3/Tahun 1965 tgl. 31 Maret 1966, maka pengamanan dan penertiban personil di Kementerian Perdagangan dan Koperasi selalu diingkatkan untuk menjapai konsolidasi aparatur Perdagangan dan Koperasi dengan sebaiknja, bersih dari unsur² GESTA-PU/PKI dan mereka jang diragukan iktikad baiknja terhadap Revolusi Pantjasila.

Sebagai hasil dari pada penelitian dan penelitian jang objektif dan seadilnja pada taraf pertama telah dikenakan tindakan penertiban/pemajatan terhadap **1748 orang** (dipetjat : 793 orang; dinonaktifkan/dischors : 955 orang) **dari lingkungan Departemen Perdagangan**. Belum termasuk dari Departemen Koperasi.

Guna ketertiban dan kelanjutan kerdja maka segala sesuatunya jang berhubungan dengan pengamanan dan penertiban personil di lingkungan Kementerian Perdagangan dan Koperasi harus disalurkan melalui Panitia tersebut dan tidak dibenarkan bagi perorangan maupun ormas untuk bertindak sendiri² dalam hubungan itu.

5. ASISTEN² MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN KEPALA BIRO MENPERDAGKOP

Dengan surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora R. I. tanggal 7 Mei 1966, No. Aa/E/59 tahun 1963 telah menetapkan pengangkatan Asisten² Menteri Perdagangan dan Koperasi serta Kepala Biro Menteri Perdagangan dan Koperasi sbb. :

Le kol. CKH Gitosewojo S.H. Nrp. 13367	— Asisten Menteri Perdagangan dan Koperasi Urusan Pembinaan
Kol. Inf. Mansjoer Nrp. 16596	— Asisten Menteri Perdagangan dan Koperasi Urusan Pengawasan/Pengamanan
Drs. Moh. Sidik Moeliono	— Asisten Menteri Perdagangan dan Koperasi Urusan Khusus
Drs. Mohammad Ibrahim	— Asisten Menteri Perdagangan dan Koperasi Urusan Perdagangan
Ir. Ibnu Sudjono	— Asisten Menteri Perdagangan dan Koperasi Urusan Koperasi
B. M. Kuntjoro Jakti S. H.	— Kepala Biro Menteri Perdagangan dan Koperasi

oo O oo

„Kalau ditanja, apakah sekarang Indonesia sebaiknya masuk kembali mendjadi anggauta IMF (International Monetary Fund — Dana Moneter Internasional), maka saja akan menjawab setjara positif: Ja, dan tidak perlu di-tunda² lagi serta ragu²“, demikian djawab Sumanang SH, bekas Executive Director IMF, sekarang Pembantu Menteri pada BAPPENAS dalam wawantjara dengan „Antara“.

„Mengenai IMF dengan pasti dapat saja katakan, bahwa banjak tokoh Indonesia diwaktu jang lalu mentjampuradukkan antara kedudukan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (World Bank). Pun berbagai golongan politik dalam masjarakat kita waktu itu pandangannja telah dikaburkan oleh mithos² jang palsu. Diantaranja ialah, se-olah² berbagai tindakan Indonesia jang tidak berhasil dibidang keuangan waktu itu, telah ditetapkan oleh IMF dan sengadja dikatjaukan oleh badan tersebut.

Keadaan jang sebenarnja ialah, bahwa berbagai tindakan Indonesia di bidang keuangan diambil sendiri oleh Pemerintah dan baru kemudian dengan terlambat sekali diberitahukan kepada IMF“.

Tiada halangan bagi bukan-anggauta PBB untuk masuk IMF

Dikatakan seterusnya, bahwa „sekalipun Indonesia menunda masuk kembali kedalam PBB, saja tjondong supaja sekarang ini djuga Indonesia masuk kembali kedalam IMF. Memang tiada halangan bagi bukan-anggauta PBB mendjadi anggauta IMF. Sebagai misal dapat dikemukakan bahwa Republik Federasi Djerman (Djerman Barat, djuga belum mendjadi anggauta PBB, tetapi sudah mendjadi anggauta IMF

Indonesia sejogianja dengan segera kembali mendjadi anggauta IMF, supaja dengan demikian kita memasuki kembali masjarakat keuangan internasional jang tergabung dalam IMF dan djuga dapat lebih mudah mengatasi keburukan keadaan keuangan sekarang ini. Lebih² lagi daripada dilapangan politik, dibidang keuangan telah lama terdjadi kerdjasama jang erat sehingga praktis tidak mungkin terdjadi sesuatu tanpa diketahui atau kerdjasama dengan negara² lain.

Negara² Eropa misalnja, telah tergabung dalam apa jang disebut DAC (Development Assistance Committee) dimana persoalan² pemberian bantuan kepada negara² jang sedang berkembang (developing countries) dan soal menghadapi kesulitan selalu dibitjarakan lebihdulu, sebelum masing² negara bertindak sendiri².

Selandjutnja dikatakan, bahwa „Indonesia keluar dari IMF pada bulan Agustus 1965 dengan meninggalkan pindjaman jang sekarang masih berdjumlah lebih kurang 63 djuta dollar AS. Sampai saat terachir sebelum Indonesia keluar dari IMF, saja telah mempertahankan supaja Indonesia tetap dalam lingkungan IMF, dan supaja hanja saja jang minta berhenti.

Akan tetapi pada waktu itu terpengaruh oleh suasana keluar dari PBB banjak pembesar² kita (termasuk bekas Menteri Bank Sentral) menentang pendapat saja“.

Tentang rentjana pindjaman untuk stabilisasi moneter dalam tahun 1962

Ditanja mengenai rentjana pindjaman Pemerintah Indonesia jang direntjanakan dalam tahun 1962 untuk keperluan stabilisasi keuangan, Sumanang SH mengatakan, bahwa „pada achir 1962 pada waktu Indonesia merentjanakan akan mengadakan stabilisasi dalam lapangan moneter, diperhitungkan Indonesia waktu itu memerlukan bantuan 600 djuta dollar US dalam djangka waktu 2 sampai 3 tahun.

Dalam keadaan inflasi sekarang ini jang djaul lebih menghebat daripada dalam tahun 1962, maka Indonesia untuk keperluan itu memerlukan paling sedikit djumlah dua kali lipat bantuan stabilisasi.

Memang menurut rentjana, IMF pada achir tahun 1962 hanja merentjanakan akan memberikan bantuan pindjaman jang relatif ketjil dari seluruh djumlah 600 djuta dollar US itu, jaitu hanja 50 djuta dollar US, sedangkan Amerika Serikat misalnja merentjanakan akan memberikan sebesar 250 sampai 300 djuta dollar, tetapi djumlah bantuan IMF jang seketjil itu merupakan kuntji bagi negara² lain untuk memberikan bantuan kepada Indonesia“.

Sebagai diketahui, kemudian rentjana bantuan stabilisasi kepada Indonesia sebesar 600 djuta dollar itu hanja permulaannja dilaksanakan, karena kemudian tidak ada ketjotjokan antara Indonesia dan IMF mengenai kelandjutannja.

Perbedaan antara World Bank dan IMF

Mengenai perbedaan kedudukan Bank Dunia (World Bank) dan IMF, selandjutnja dikatakan, bahwa „dua badan internasional itu berlainan satu sama lain dan berbeda pula lapangannja. Bank Dunia untuk gampangnja dapat saja katakan, adalah salah satu organisasi jang memberikan pindjaman² untuk pembangunan projek² dari pabrik sampai djalan keretaapi dan sekolah, sedangkan IMF memberikan pindjaman untuk mendjaga keseimbangan neraca pembajaran atau kestabilan keuangan.

Kebidjaksanaan management kedua organisasi internasional itupun berlainan djuga, jaitu Bank Dunia sampai sekarang masih terlalu kolot, sedangkan IMF lebih maju dan lebih mengerti serta menyesuaikan diri dengan perkembangan² dunia sekarang ini.

Misalnja, World Bank tidak akan mempertimbangkan permintaan pindjaman² dari negara² jang telah mengambil alih perusahaan² asing, sebelum tertjapa penyelesaian tentang ganti rugi pengambil alih perusahaan² asing itu. Ini telah terdjadi dengan beberapa negara misalnja Srilangka, Indonesia dan

beberapa negara lainnja. Sikap World Bank ini lebih alot daripada negara² jang bersangkutan sendiri (jang perusahaan²nja diambil alih), sehingga njata² management Bank Dunia itu dapat dikatakan menampuri politik dalam negeri dari pemerintah² jang tidak diberi bantuan.

Ini terbukti dalam persoalan hubungan Indonesia dan Nederland. Walaupun antara Indonesia dan Nederland belum tertjapai penjelesaian mengenai ganti rugi pengambil alihan perusahaan² Belanda di Indonesia, tetapi pemerintah Belanda sudah mengadakan approach terhadap Indonesia dalam soal bantuan.

Karena hal² diatas itulah, maka Indonesia belum pernah meminta pindjaman dari Bank Dunia, sedangkan dari IMF berulang kali mendapat pindjaman dan juga mendapat bantuan tenaga ahli keuangan².

IMF bukan merupakan agency biasa seperti Unicef d.l.l.

Atas pertanyaan mengenai hubungan IMF dengan PBB, Sumanang SH mengatakan, bahwa „dalam pergaulan se-hari² memang IMF sering digolongkan dalam badan² agencies dari PBB, tetapi IMF tidak

dapat disamakan dengan misalnja FAO, Unicef, WHO d.l.l.s.

Agencies seperti WHO, FAO, Unicef d.l.l. itu memang merupakan tjabang kegiatan PBB jang dibiayai dan ditetapkan kebidjaksanaannja oleh PBB. Tidak demikian dengan IMF. IMF mempunyai management sendiri dan keanggautaan sendiri dan sumber pembiayaan tersendiri, jaitu uang saham para anggauta. Dan umurnjapun lebih-tua daripada PBB sendiri.

Dalam pergaulan se-hari² IMF disebut „agency” karena adanya agreement jang se-mata² untuk dapat menggunakan hak² diplomatik dari PBB. Dan persetujuan antara IMF dan PBB itu atas dasar persamaan kedudukan setjara timbal-balik.

Negeri² sosialis, termasuk Uni Soviet (anggauta PBB) tidak merupakan anggauta IMF. Polandia dan Tjekoslowakia keluar dari IMF beberapa tahun jang lalu, sedangkan Kuba keluar tahun jang lalu. Akan tetapi semua negara² Afrika-Asia tanpa ketjuali merupakan anggauta IMF”. Demikian Sumanang SH dalam wawantjara dengan „Antara”.

C.V. ADANG & SONS

PEKIRINGAN 21

TELP. 36 - 1691

T J I R E B O N

IMPORT — EXPORT

L/C Jang Mengandung Sjarat² Jang Tidak Dapat Dipenuhi cq Dikuasai di Indonesia

Mengingat bahwa masih banyak jang belum mematuhi ketentuan² jang berlaku dalam bidang lalulintas devisa, maka oleh BLLD dengan pengumumannja No. 5/Eks/BLLD/66 tgl 18 Mei 1966, meminta perhatian akan hal berikut :

1. Dalam pasal 1.3.5. Himpunan Peraturan Prosedur Devisa (HPPD.) telah ditegaskan, bahwa bank² devisa tidak diperkenankan untuk melajani dan menerima Letter of Credit jang mengandung sjarat² jang tidak dapat dipenuhi cq dikuasai di Indonesia.

Dalam hal sesuatu L/C mengandung sjarat jang demikian, maka Bank Devisa, setelah merundingkannja dengan eksportir jang bersangkutan, harus menolak L/C.

2. Antara lain dapat disebutkan disini suatu tjontoh sjarat L/C jang pengudjiannja tergantung di Luar negeri, yakni : „negosiasi wesel oleh bank devisa di Indonesia baru dapat dilakukan

setelah diperoleh di luar negeri tentang telah dilaksanakannja transshipment di Luar negeri oleh second carrier” („second carrier endorsement clause”), sjarat mana **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

3. Djuga pengiriman dokumen² ekspor „one mail” sebagaimana disjaratkan dalam L/C tidak dapat diterima dan harus ditolak. Sebagai mana lazimnja, pengiriman dokumen² dimaksud tetap dilakukan dalam „two separate air mail” dengan tjatatan bahwa bank koresponden di luar negeri dapat melakukan pembayaran wesel atas penerimaan dari „first mail” mendahului tibanja „second mail” (jang mungkin tibanja terlambat).

4. Dalam hal² bank devisa meragukan sesuatu clause dalam sesuatu L/C, apakah membenarkan Indonesia atau tidak, hendaknja bank jbs dengan segera menghubungi BLLD terlebih dulu guna keputusan.

Penjetoran Kembali Selisih Antara Valuta Asing Jang Tertera pada KPP dengan Perhitungan Bea dan Tjukai

Mendahului perobahan Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No. Kep. 2/UBS/65 tgl. 8 Djanuari 1965 perihal tersebut diatas, maka dengan **Pengumuman BLLD No. 2/Imp/66 tgl. 17 Mei 1966** diberitahukan sebagai berikut:

1. Apabila terdapat selisih antara djumlah valuta asing jang tertera pada K.P.P. dan djumlah valuta asing menurut pendapat/peneetapan Bea dan Tjukai, maka importir diwadjabkan segera menjetor kembali dalam Dana Devisa selisih tersebut atau dalam hal penjetoran ini tidak segera dapat dilakukan, suatu djumlah

dalam Rupiah sebagai djaminan unuk kepentingan an BLLD. Kurs uang djaminan tersebut ditetapkan Rp. 100.— (u.b.) unuk tiap US\$ 1,— valuta asing jang harus disetorkan kembali.

2. Djumlah Rupiah tersebut diatas dikembalikan apabila valuta asing bersangkutan disetor dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal pemberitahuan oleh Bea dan Tjukai.

3. Ketentuan ini mulai berlaku terhadap pembayaran uang djaminan pada tanggal 15 April 1966 dan sesudahnja.



P.T. TJIKUDA PATEUH

Djl. Djenderal A. Yani 204,A-B.

BANDUNG

Memproduksi : KAIN KLAMBU,
KAIN KASUR,
dll.

Keputusan² Musjawarah Nasional Ekonomi:

Pada sidang pleno terakhir Rabu siang tanggal 11 Mei 1966, Musjawarah Nasional Ekonomi yang dihadiri oleh kira² 450 peserta baik dari daerah² maupun pusat yang mewakili semua unsur yang ada hubungannya dengan ekonomi, keuangan dan pembangunan telah menjapai beberapa keputusan.

Keputusan² yang ditjapai itu digodok dalam 4 buah komisi, masing² komisi A tentang prasaratan politik & pemerintahan guna pertumbuhan ekonomi nasional, komisi B tentang pembahasan ekonomi terpinpin, komisi C tentang rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi, komisi D mengenai hubungan ekonomi internasional dan masalah modal asing di Indonesia dan komisi E atau umum.

Munas Ekonomi tersebut dibuka pada tanggal 7 Mei dan berlangsung s/d 11 Mei 1966. Rapat ini dipimpin setjara kolektif oleh sebuah presidium musjawarah yang diketahui oleh Wahyu Kusumanegara.

Adapun keputusan² yang telah diambil sbb. :

Prasaratan politik dan pemerintahan guna pertumbuhan ekonomi nasional :

1. Dengan konsekwen mendukung statement Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 1966.
2. Menjarankan supaya DPR-GR yang disertai tugas oleh Presiden untuk menjiapkan undang² pemilihan umum, undang² tentang pembentukan D.P.A., dan penjempurnaan M.P.R.S. serta lembaga² tertinggi Negara lainnya, dibersihkan dari segala unsur yang tidak menjjamin kesetiaan kepada pelaksanaan Pantjasila dan Ampera.
3. Mengingat bahwa berhasil/tidaknja pentrapan sistim ekonomi bergantung kepada para pelaksanaannya, maka Musjawarah Nasional Ekonomi mendesak kepada yang berwenang untuk segera merombak Kabinet Dwikora, dan membentuk kabinet baru yang mampu memenuhi Tri-tuntutan rakjat, demi kestabilan djalannya pemerintahan dan Revolusi Indonesia.
4. Untuk tudjuan itu menjarankan kepada yang berwenang agar memberikan kekuasaan penuh kepada Letnan Djendral Soeharto, Djendral A.H. Nasution dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX guna melaksanakan pembentukan kabinet baru yang dimaksudkan demi untuk menjdaga kewibawaan Presiden Sukarno serta adjaran²nja.
4. Mendesak kepada yang berwenang untuk menertibkan pendjabatan fungsi² legislatif, eksekutif dan judikatif setjara terpisah, sehing-

ga terhindarkan setjara tegas perangkapan fungsi legislatif, eksekutif dan judikatif. Dengan djalan demikian maka njata akan adanya azas penelitian dan perimbangan (check and balance).

5. Untuk menjapai keseimbangan antara djalannya politik dan ekonomi maka disarankan kepada yang berwenang untuk mengikutsertakan ahli² ekonomi dalam segenap lembaga Negara dari yang tertinggi sampai yang terbawah dalam djumlah yang tjukup untuk melaksanakan apa yang dimaksudkan oleh pengikutsertaan ini.
6. Menjarankan kepada yang berwenang untuk benar² mengadakan penghematan dalam anggaran belandja Negara yang menjeluruh.
7. Menjarankan supaya hubungan diplomatik dengan RRT diputuskan karena terbukti bahwa RRT mendalangi Gerakan 30 September dan pengatjauan ekonomi nasional.
8. Mendukung dan bekerdjasama dengan Angkatan '66, terutama dengan KAMI dan KAPPI dalam mengemban Ampera.
9. Keputusan ini didukung oleh segenap peserta Musjawarah Nasional Ekonomi dengan segala konsekwensinja.

Tentang Ekonomi Terpinpin.

Untuk memperbaiki pelaksanaan ekonomi Terpinpin, Musjawarah Nasional Ekonomi mengadjujukan usul-usul sebagai berikut :

1. Hendaknja Pemerintah dalam waktu dekat dapat mengumumkan tentang definisi, kerangka dasar (basic concept) beserta sistim pelaksanaan daripada Ekonomi Terpinpin.
2. Selama usul diatas ini belum dapat ditjukupi, hendaknja Pemerintah mengertikan Ekonomi yang dipimpin oleh suatu Rentjana yang disusun setjara demokratis dan harus ditaati oleh Pemerintah dan Rakjat.
3. Pelaksanaan daripada Rentjana Ekonomi hendaknja diserahkan kepada unit² ekonomi : Sektor Negara, Sektor Koperasi, Sektor Swasta Nasional, dengan sistim target, kegiatan pelaksanaannya.
4. Rentjana Ekonomi hendaknja terdiri atas : Produksi benda² konsumsi, Produksi benda² bahan, Produksi benda² alat, dengan masing² berdasarkan imbalanced mengikuti keperluan untuk rehabilitasi dan stabilisasi keadaan sekarang.
5. Untuk merehabilitasi kekeliruan² dalam hal pelaksanaan UUD pasal 33 dan sesuai pula dengan rentjana Pemerintah untuk mengurangi beban keuangan akibat defisit yang ditimbulkan oleh perusahaan² Negara, hendaknja

Pemerintah dalam waktu dekat menjerahkan kepada Swasta Perusahaan² Negara yang tidak merupakan tjabang² produksi yang termasuk dalam UUD pasal 33.

6. Bidang Swasta yang dilakukan oleh pengusaha² asing hendaknya oleh Pemerintah dikenakan pembatasan² sebagai berikut :
 - a. Masing² kebangsaan yang diperkenankan berusaha di Indonesia dibatasi paling sedikit 50 orang.
 - b. Pengusaha² asing yang diperkenankan hanyalah berkegiatan dalam bidang industri berat.
7. Kredit bagi Pengusaha² Swasta Nasional hendaknya dipermudah, sedang tarif bunga yang dikenakan oleh Bank² pemberi kredit hendaknya diturunkan hingga paling tinggi 6% setahun.
8. Di tiap² Ketjamatan diadakan suatu Badan Pengumpulan Hasilbumi Rakjat/Keradjinan Rakjat, dalam badan mana hasilbumi² dan/atau hasil² Keradjinan Rakjat dikumpulkan dengan status : Barang dalam konsignasi untuk ditjarkan pembeli oleh Badan Pengumpulan tersebut diatas, dengan harga yang dapat mempertinggi tenaga beli penghasil² yang bersangkutan.

Tentang rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi :

1. Dalam rangka kembali kepada kemurnian pelaksanaan UUD '45 setjara konsekwen dan dalam rangka menanggulangi kesulitan ekonomi/moneter harus ditudjukan kearah rehabilitasi dan stabilisasi sebagai landasan untuk pertumbuhan ekonomi selanjutnja. Dalam melakukan usaha² kearah itu perlu ditjapkan terlebih dahulu suatu suasana ekonomi umum yang melegakan sebagaimana telah ditegaskan oleh Waperdam Sri Sultan dalam Statement Politik Ekonomi tertanggal 12 April 1966 yang lalu dengan landasan perubahan mental serta peningkatan operasi Ampera, sebagai salahsatu tjara untuk perubahan mental tersebut yang meliputi segala bidang ekonomi, moneter dan pembangunan serta mengikis habis sisa² G-30-S/PKI, benalu² revolusi, koruptor², plin-plan, vested interest dan unsur² Baperki dari segala aparat perekonomian.
2. Musjawarah Nasional Ekonomi setelah mempelajari dan membahas setjara mendalam Statement Sri Sultan tgl. 12 April 1966 berpendapat bahwa statement tersebut tjukup realistis untuk dilaksanakan dalam djangka-waktu singkat mendesak agar Waperdam Ekubang segera mengeluarkan peraturan² pelaksanaannja untuk mentjegah adanya stagnasi dibidang ekonomi/moneter dan mengusulkan agar dalam penjusunan peraturan² pelaksanaan tersebut dipertimbangkan pendapat² dari Musjawarah Nasional Ekonomi/peserta²-nja.

3. Musjawarah Nasional Ekonomi dalam rangka pelaksanaan Statement Waperdam Ekubang tanggal 12 April 1966 chususnya dalam rangka mentjapkan suasana ekonomi umum yang melegakan berpendapat perlu memintakan perhatian Pemerintah atas hal² yang berikut :

A. Bidang produksi :

Mengenai pangan mendukung dan mengharagai sepenuhnya kebidjaksanaan Waperdam Ekubang dalam bidang produksi pangan seperti dirumuskan dalam Statement Waperdam Ekubang tgl. 12 April '66 sbb. :

- a. memberikan bantuan dalam hal irigasi, pupuk, obat²an dll.
- b. ekstensifikasi areal produksi pangan antaranja mechanized state farming.
- c. melaksanakan landreform terutama dengan tudjuan² ekonomis.
- d. mengadakan research ilmiah yang mendalam serta luas mengenai adat gotong-rojong desa.

Mengenai barang² ekspor diharapkan agar Pemerintah memberikan perhatian khusus pada peningkatan produksi barang² ekspor sekurang²-nja mentjegah kemerosotannja djalan menjediakan :

- a. kebutuhan minimal akan spareparts dan bahan baku.
- b. fasilita kredit
- c. alat² pertanian dll.

Sedang untuk mentjegah desintegrasi lebih landjut dari sektor² industri lainnja Pemerintah perlu mentjari usaha² untuk memungkinkan berkerdjanya industri² tersebut pada tingkat kapasitas produksi tertentu.

B. Bidang Prasarana :

1. Angkutan Darat :

Agar Pemerintah memberikan perhatian sepenuhnya kepada perbaikan djalan² yang mempunyai arti ekonomis disamping menjediakan spare-parts untuk kendaraan² ekonomi seperti truck, pickup dan jeeps sebagaimana yang djatakan dalam bidang angkutan untuk usaha² rehabilitasi kereta api.

2. Angkutan Laut :

Selain perbaikan pada dock dan port scilities yang telah disinggung dalam Statement Waperdam Ekubang, tidak dapat ditinggalkan usaha² untuk mempertumbuhkan armada angkutan laut termasuk armada perahu lajar yang kuat mengingat kedudukan Indonesia sebagai negara maritim.

3. Angkutan Udara :

Agar Pemerintah mempertimbangkan/menindjau kembali line Garuda ke luarnegeri yang ekonomis tidak dapat dipertanggungjawabkan dan mengalihkannya ke line dalamnegeri.

Telekomunikasi :

Mengingat eratnja hubungan telekomunikasi dengan kelantjaran perdagangan, maka Musjawarah tetap meminta perhatian Pemerintah akan usaha² perbaikan dibidang telekomunikasi ini terutama antara daerah dan pusat.

Bidang distribusi :

Untuk memperlantar flow of goods setjara djar diseluruh kepulauan Indonesia, Musjawarah mengharapn agar Pemerintah segera menubut peraturan² jang menghambat kelantjaran w of goods tersebut. Agar Pemerintah segera nghapuskan matarantai² distribusi jang tidak lu antara produsen dan konsumen baik mata-tantai itu memakai kedok perusahaan negara, operasi ataupun swasta, agar 19 bahan² pokok kebutuhan rakjat tidak diperkenankan mendjabar barang spekulasi, dan jang melanggar agar dikum berat.

Bidang Moneter :

Musjawarah menjetudjui RAB 1966 segera dibawa ke DPR-GR dan meminta pos² jang bersifat PM ditekan seminimal mungkin.

Musjawarah menjetudjui segera diadakan tax reform dengan lebih menitikberatkan pada direct taxes. Indirect taxes ternjata selama ini achirnja mendjadi beban konsumen ketjil. Musjawarah meminta agar Balance of Trade dan Balance of Payment segera disusun dan diumumkan kepada rakjat.

Musjawarah meminta agar dalam bidang moneter angka² jang diperlukan dapat dipublisir melalui mass media.

Musjawarah meminta agar segera dibuat UU Pol:ok Perbankan termasuk Bank Sentral.

Guna membantu usaha² produksi dibidang finansiering di taraf Pusat sampai ke desa dan memperluas penampungan uang jang ada dalam masyarakat hingga tidak merupakan unorganized money market, Musjawarah berpendapat Pemerintah perlu mengusahakan atau membuka kemungkinan guna pembukaan bank² sampai ke ketjamatan dan desa baik oleh Pemerintah maupun Swasta.

Disamping hal² jang dikemukakan dalam ang² diatas Musjawarah Nasional Ekonomi asa perlu untuk menjampaike hal² sbb. :

Pembangunan Ekonomi Desa/Pertanian rakjat sebagai landasan dari ekonomi negara kita perlu mendapat perhatian Pemerintah terutama dalam bidang irigasi dan perbaikan djaln².

Agar Pemerintah segera mengambil langkah² screening personalia untuk mendapatkan right man on the right place, jaitu manusia jang berwatak Pantjasilais, djudjur dan ahli.

Agar Pemerintah menjederhanakan aparaturnja terutama di bidang ekonomi agar tertjapai one coordinated unit dan one coordinted policy untuk meningkatkan efisiensi.

4. Agar dipikirkan usaha² ke arah penjederhanaan pegawai² negeri dan PN setelah terlebih dahulu dibersihkan dari unsur² G-30-S/PKI, vested interest dan plin-plan sampai ke tingkat jang optimum jang tinggal diberikan djaminan jang lajak dan jang lainnja disalurkan ke sektor² jang produktif.
5. Agar Pemerintah segera menetapkan pembagian wewenang ekonomi antara Pusat dan Daerah untuk mempertinggi swadaja daerah tanpa merugikan kebidjaksanaan Pemerintah di tingkat Nasional.
6. Agar Pemerintah segera mentjabut semua peraturan² di bidang ekonomi/moneter jang bersimpangsiur dan kemudian setjara nominatif menetapkan peraturan² jang berlalu.
7. Agar pelaksanaan Landreform diteruskan se pandjang mempunyai efek memperbesar volume produksi.
8. Agar Pemerintah segera mengeluarkan garis² pokok kebidjaksanaannja tentang pembidangan usaha negara, koperasi dan swasta.
9. Agar Pemerintah menggiatkan usaha² Transmigrasi spontan dengan djaln memudahkan/ menjederhanakan prosedur²nja dan menjiapkan tempat² penampungan di daerah baru jang mendjamin kelangsungan hidup para transmigran tersebut di tempat baru dengan mengindahkan keadaan setempat.

Tentang Hubungan Ekonomi Luarnegeri :

1. Seperti halnja dengan hubungan politik Indonesia dengan Luarnegeri, maka dalam persoalan ekonomi kita wadjib mendasarkan segala dajaupaja agar dalam bidang ini djuga hubungan itu diadakan untuk kepentingan nasional kita.
2. Kepentingan Nasional itu pada tingkat Revolusi dewasa ini adalah pembangunan ekonomi sosial untuk memenuhi Trituntutan dan Ampera.
3. Bahwa pembangunan tersebut kita sadari lebih² dalam keadaan ekonomi jang parah sekarang, jang dibebani dengan hutang luarnegeri jang sudah begitu banyak, dibutuhkan modal biaja, kemampuan tehnik, tenaga dan ketekunan kerdja jang tidak sedikit. Oleh sebab itu ekspor kita harus dimasukkan sebagai impor kita harus diatur sebaik²nja.

Oleh karena itu maka setiap kerdjasama serta bantuan ekonomi dan tehnik jang didapat dari luarnegeri akan disambut dengan gembira, asalkan kerdjasama bantuan itu tidak mengikat bangsa Indonesia dalam bidang politik, militer, ekonomi dan kebudayaan dan tidak berpengaruh terhadap dajadjuang jang bebas dari Bangsa Indonesia sendiri. Bantuan itu harus ditudjukan pada suksesnja program rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi, dewasa ini dan pertumbuhan ekonomi-sosial Indonesia selanjutnja.

4. Sumber alam jang berada di wilayah tanah-air Indonesia merupakan sumber hidup dan penghidupan Bangsa Indonesia, sehingga hak memiliki, mengolah dan memakainja berada di tangan bangsa sendiri. Oleh karena itu tiada hak bagi siapapun jang bukan Warganegara Indonesia untuk mentjampuri persoalan ini. Oleh karena itu pula dominasi ekonomi asing di Indonesia harus ditolak.

Tentang Masalah Asing di Indonesia :

1. Karena letak geografis serta kekajaan sumber alamnja, maka Indonesia menarik banjak perhatian dari negara² lain. Dalam hubungan ini maka peraturan² jang khusus ditudjukan kepada orang² asing baik jang menetap maupun jang tidak, harus diatur kembali, baik mengenai djumlah orangnja, batas waktu tinggalnja, usahanja dan modal jang ditanamnja.
2. a. Dalam rangka hubungan jang chas dengan Tiongkok, jang pada dewasa ini mendjadi perhatian dan tuntutan masjarakat banjak sudah tiba waktunja kalau Pemerintah dan

Rakjat Indonesia mengambil tindakan jang tegas terhadap pengaruh orang² asing² jang onggok dibidang ekonomi. Untuk itu maka perlu segera dilaksanakan kembali P.P. 10 — 1959, jang ditingkatkan lagi berlakunja sampai ke Ibukota Swatara Tingkat I.

- b. Selaras dengan pokok tersebut diatas maka perlu adanja larangan mengenai ruar bergerak daripada permodalan mereka sert daerah kerdjanja, sehingga mereka hantj boleh berusaha didalam bidang industri menengah sadja.
 3. Warganegara Keturunan Asing, chusus Saurada² dari Keturunan Tionghoa, hendaknj mengintegrasikan dan mengasimilir diri dalam hidup dan penghidupan Bangsa Indonesia bukan sadja dalam bidang politik, tapi djuga sosial dan ekonomi. Tergantung dari kesadaran dan kegiatan mereka sendiri, apakah di Indonesia masih terdapat golongan minoritas.
- Demikianlah a.l. keputusan² Musjawarah Nasional Ekonomi jang diachiri sidangnja Ratu tanggal 11 Mei 1966.

P. T. PUSAKA „KUDJANG“

Pusat : Djl. Riau 108 Tilpon 7770 — 2876 — Bandung

Tjabang : Djl. R.A. Kartini No. 21, Tilpon 1655 Timur - Tjirebon

Cable : PUSAKA,

Bank: SILIWANGI — B.D.I. — SEDJAHTERA BANK UMUM — B.N.I. Unit II/IV.

Rubber
 Quinine Salt (Hidrochloras/Sulfat)
 Tea
 Coconut oil
 Seaweed
 Citronella oil
 Cananga oil
 Vertivert oil
 Peanut waste — cake
 Paddi-bran (dedak)
 Gapplek-roots

Maize
 Tapioca roots
 Kapokseed
 Sesame Seed
 Castor Seed
 Ground-nut
 Soya beans
 Other agricultural product/
 for cattle needs.

Adjaran² Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno

KONGRES KAUM IBU

*Bedenk dat het voor de eer van de natie is, dat India's vrouwen
na dag treden voor de poorten den doods, zodat het volk van India
boren mag worden duizeñdmalen vrij!*

Sarojini Naidu.



Pada penghabisan bulan Desember ini, maka kaum ibu Indonesia akan berkongres di Djokja.

Bahagia lah kongres kaum ibu : Diadakan pada suatu waktu, dimana masih ada sahadja kaum bapak Indonesia jang mengira, bahwa perangnya mengedjar keselamatan nasional biad juga lekas berhasil zonder sokongannya kaum ibu ; diadakan pada suatu waktu djuga, dimana masih belum banjak bertahan kejakinan, bahwa tiada keselamatan nasional bila tidak terul oleh keselamatan kaum bapak dan kaum ibu, dan bahwa "keselamatan" jang demikian ialah keselamatan nasional jang pintjang ; — diadakan pada waktu jang demikian itu, maka sangatlah gembira hati. Dan kita sahadja gembira hati akan kongres itu, oleh karena dari-kaum bapak masih banjak jang kurang pengetahuan akan harganya sokongan kaum ibu ; kita tidak sahadja gembira hati akan kongres itu oleh karena kaum bapak belum sjaif akan keharusannya kenaikan deradjat kaum ibu itu, — kita gembira hati ialah teristimedjuga oleh karena dikalangan kaum usendi belum banjak jang mengemudi atau mendjalankan kewadjabannya ikut memperburkan diri didalam perdjoangan bangsa, dan kaum banjak jang berkehendak akan kenaikan deradjat itu. Adat-istiadat jang berabad-abad, adat-istiadat jang sudah menjulurr itu, adalah menjebakkan, jang banjak kaum bangsa kita tak memikirkan soal kenaikan deradjat itu ; hamba jang memusuhi usaha mekan deradjat itu ; hamba jang bernama kaum itu adalah banjak jang tak insjaif akan perbaikannya sendiri

Tetapi, desakan zaman tak dapat alah, akan zaman tentu menang. Desakannya zaman makin lama makin membukakan keinsjafan dan perhambaan kaum itu, dan melahirkan perlawanan akan "soal wanita" di Indonesia djuga.

Toch djikalau kita bandingkan dengan negeri-negeri Asia lain, djikalau kita bandingkan dengan Turki, dengan Mesir, dengan India, dengan Japan dan lain sebagainya, dimana deradjat kaum perempuan itu belum lama berselang toch djuga rendah sekali dan djuga terhina sekali, maka Indonesia kini tampak djauh sekali ketinggalan.

Sedang misalnja dinegeri-negeri Asia jang lain orang sudah mulai banjak jang mengerti, bahwa agama Islam jang asli ialah tidak merendahkan deradjat kaum ibu, bahkan mempunyai orang-orang ikut duduk berunding tentang soal-soal jang penting misalnja soal chalifaat, atau Zobeida permaisuri Haun-Al-Rasjid jang mengongkosi pembuatannya djalan air di Mekkah dan mendirikan lagi kota Alexandria sesudah kota itu dilebur oleh bangsa Griek, atau Fakhroevissa Sheika Shulda jang membuat tjeramah-tjeramah dimuka umum di Bagdad tentang sastra dan sjair, atau pula berpuluh-puluh tabib dan penjair perempuan dikota Cordova sedang negeri-negeri jang lain-lain itu kaum ibunya sudah melepaskan diri daripada kesesatan tentang memahamkan kehendak-kehendak Islam jang sedjati, maka di Indonesia kaum jang beragama Islam masih banjaklah sekali jang belum terlepas daripada ikatannya kesesatan paham tahadi. Dan bangsa kita kaum ibu jang beragama lainpun, jang memang sebenarnya tiada ikatan jang sematjam itu, adalah djuga djauh ketinggalan oleh kaum ibu bangsa Asia jang lain tahadi. Lihatlah ! Adalah Indonesia-Muda mempunyai seorang perempuan sebagai Halide Edib hanum dan Nakie Hanum-nja Turki-Muda ? Adakah Indonesia-Muda berputri sebagai Sarojini Naidu atau Sarala Devi-nja India-Muda, sebagai Soong Ching Ling-nja Tiongkok-Muda, sebagai Zorah Hanum-nja Persia-sekarang ? Adakah Indonesia-Muda mempunyai isteri sebagai isterinya Saad Zohlul di Mesir-Baru ? Dan adakah kaum ibu Indonesia pernah bergerak sebagai ka-

um ibunja Korea, jang menentang penghinaan-
nja Djepang? Belum! Tetapi marilah tidak ket-
tjil hati. Sebab d j i k a l a u zaman nanti
sudah mau melahirkan lagi kita punja Ratu Wan-
dan Sari atau kita punja Ratu Ibrahim, d j i -
k a l a u zaman nanti sudah mau mengemba-
likan lagi Ratu Bundo Kandung atau kita punja
Ratu Djangpati, maka pastilah mereka lahir,
pastilah mereka kembali djuga!

Sekarang hendaklah kita selidiki sebentar,
arti jang bagaimanakah harus kita beri pada
s o a l - p e r e m p u a n di Indonesia itu.

Soal-perempuan di Indonesia. Menuliskan
kata-kata ini maka dengan tidak disengadja, ter-
gambarlah didalam angan-angan kita keadaan
dan tjara-metodenja kumpulan-kumpulan kaum
ibu Indonesia dikota-kota besar dan ketjil: tidak
beda dengan keadaan dan tjara-metodenja per-
himpunan-perhimpunan perempuan kaum perte-
ngahan di Eropah abad jang lalu, tidak beda de-
ngan mula-mulanja "vrouwenbeweging" di Ero-
pah itu baru lahir dizamannja liberalisme; semua-
nja belum mengambil soal-perempuan itu dida-
lam artinja jang luas, belum mengambil soal itu
didalam artinja *sosial-politis* jang selebar-lebar-
nja, yakni belum melantjarkan tangannja keluar
pagar-pagarnja perikehidupan "keperempuanan":
..... hanja memperhatikan ilmu dapur, belad-
jar menjongket, bersama-sama mengurus per-
kara beranak, mengadakan kursus ilmu obat-
obatan, memperhatikan pendidikan, lain-lain.

Dan sebagaimana pula kaum perempuan di
Eropah sesudahnja zaman "keperempuanan" itu
lalu meluaskan sedikit lapang pekerdjaannja
dan lantas berdaja-upaja mentjari p e r s a m a -
a n - h a k dengan hak-hak kaum laki-laki;
sebagaimana kaum perempuan di Eropah itu lan-
tas mengindjak lapannja usaha "vrouwen-eman-
cipatie", dengan belum mengetahui bahwa per-
samaan-hak dan persamaan-deradjat dengan ka-
um laki-laki itu ialah belum berarti k e s e l a m -
a t a n, maka di Indonesia-pun kaum ibu
pada waktu ini sedikit-sedikit mulai berusaha
kearah persamaan-hak dan persamaan-deradjat
dengan laki-laki, yakni mulai ikut pula memikir-
kan "vrouwen-emanicipatie" itu. Tetapi sebagai-
mana August Bebel dalah tahun 1879 membikin
terperandjatnja kaum "persamaan-hak" ini de-
ngan peringatannja, bahwa kaum perempuan ti-
daklah dapat mentjapai keselamatan jang seben-
nar-benarnja dengan persamaan-hak itu s a -
h a d j a, melainkan ialah harus m e l u a s -
k a n l a g i lapang-usahanja dengan ikut be-
kerdja untuk mendatangkan suatu a t u r a n
p e r g a u l a n - h i d u p b a r u, maka bagi
kaum ibu Indonesia, haruslah kita peringatkan
pula, bahwa persamaan-hak dan persamaan-der-
adjat itu djanganlah dipandang sebagai tjita-
tjita jang penghabisan hendaknja! Betul sekali:
"keperempuanan" haruslah diperhatikan; "eman-

cipatie" harus dikedjar. Tetapi d e n g a n "ke-
perempuanan", d e n g a n "emanicipatie", ka-
um ibu Indonesia, djikalau mereka memang ingin
mentjapai kehidupan jang sempurna dan djuga
lalu mereka ingin bernasib m a n u s i a jang
seselamat-selamatnja, — kaum ibu Indonesia ha-
ruslah pula meluaskan lagi lapang pergerak-
anja, mengedjar hak-hak kita semua laki-perem-
puan, mengedjar hak-hak sebagai b a n g s a.
Sebab apakah kiranja sudah tjukup, jang kaum
ibu Indonesia mendjadi sama haknja dengan ka-
um bapak Indonesia, — hak kaum bapak Indo-
nesia jang terikat-ikat ini? Apakah kiranja su-
dah tjukup, jang kaum ibu Indonesia mendjadi
sama deradjatnja dengan kaum bapak Indonesia
— deradjat kaum bapak Indonesia jang tak le-
bih daripada deradjatnja orang djadjaan, tak
lebih daripada deradjatnja putera negeri jang
tak merdeka? Bahwasanja: djikalau ka-
um ibu Indonesia hanja ingin sama haknja dan
hanja ingin sama deradjatnja dengan kaum ba-
pak Indonesia itu; djikalau hanja ingin itu
sahadja dipandangnja sebagai tjita-tjita jang ter-
tinggi, maka tak lain tak bukan, mereka hanja
lah ingin mengganti deradjatnja budak ketjil
mendjadi budak besar belaka

Tidak! Sebagai jang sudah kita tuliskan di
muka, maka tudjuan kaum ibu Indonesia harus
lah lebih tinggi lagi: mereka harus bersikap se-
bagai saudara-saudaranja dilain-lain negeri Asia
jang tak merdeka. Mereka harus mengerti bahwa
sebagai Sarojini Naidu mengatakannja, bukan
sahadja kaum laki-laki, tetapi kaum perempuan
djuga harus siap "menghadapi gerbangnja mau
didalam usahanja membuat natie"

Seorang penulis bangsa Timur mengatakannja
bahwa "laki-laki dan perempuan adalah sebagai
dua sajanja seekor burung", jang djika dua
sajanja itu "dibikin sama kuatnja", lantas "terban-
menempuh udara sampai kepuntjaknja kemadju-
an jang setinggi-tingginja". Ia bermaksud me-
nuntut supaya "semua pintu harus dibuka seluas
luasnja" bagi kaum perempuan itu; ia bermak-
sud menuntut persamaan-hak dan persamaan-
deradjat baginja Tetapi kaum ibu Indo-
nesia, kaum ibu ditiap-tiap negeri djadjaan harus
lah mengerti, bahwa baginja, burung tahad
ialah burung jang terkurung, burung jang ole-
karenanja belum dapat "menempuh udara sam-
pai kepuntjaknja kemadjuan jang setinggi-ting-
nja" Buat kaum ibu Indonesia dinegeri
negeri jang tak merdeka, buat tiap manusia di
negeri-negeri jang tak merdeka, maka bukan sa-
hadja dua sajanja itu harus didjadikan sama, bu-
kan sahadja laki-laki dan perempuan harus di-
jadikan sama kuatnja dan lalu bekerdja be-
sama-sama, agar supaya burung kebangsaan lar-
tas dapat bertenaga menggerak-bantingkan dir-
nja didalam sangkar itu, jang nanti tidak boleh
tidak, pasti mendjadi terbuka oleh karenanja,
sehingga burung kebangsaan itu lalu dapat ter-

bang keluar dan terbang keatas dengan leluasa menudju segala keindahannya angkasa dan menghisap dengan leluasa pula segala hawa-kesegarannya udara jang merdeka!

Inilah soal-perempuan di Indonesia didalam sifatnya sosial-politis jang luas. Kita barangkali dulu mendapat tuduhan, bahwa kita terlalu "mempolitikkan" soal ini. Kita tidak terlalu "mempolitikkan" soal ini. Kita memudjikan penulisan jang demikian, tak lain tak bukan ialah oleh karena pada hakekatnya soal-perempuan tidak dapat dipisahkan daripada soal laki-laki. Sebab perikehidupan laki-laki dan perikehidupan perempuan adalah bergandengan satu sama lain, mempengaruhi satu sama lain, menjerapi satu sama lain. Kitapun harus memperingatkan, bahwa jang menderita pengaruhnya sesuatu proses kemasyarakatan, dus djuga proses kolonial sebagai disini, ialah bukan sahaja satu bagian, bukan sahaja kaum laki-laki, tetapi semua manusia laki-perempuan jang berada didalam lingkungannya proses kemasyarakatan itu. Oleh karenanya, hendaklah kaum perempuan mengerti bahwa kerdja-perlawanan terhadap pada pengaruhnya proses itu, hendaklah harus didjalankan oleh "fihak jang kuat" sahaja, tidaklah harus diserahkan kepada kaum laki-laki sahaja, tetapi haruslah dikerdjakan djuga oleh "fihak jang lemah" yakni oleh fihak perempuan itu tahadi. Hendaklah saudara-saudara kita fihak ibu sama insjaf, bahwa kerdja-perlawanan itu tidak akan berhasil baik dan tidak akan dapat lekas selesai, djikalau tenaga untuk kerdja itu tidak dikeluarkan oleh semua sumber-sumber jang berada didalam lingkungannya pengaruh proses itu tahadi, ialah djikalau kerdja itu tidak didjalankan oleh fihak laki-laki dan fihak perempuan dua-duanya djuga adjukan pada kaum perempuan untuk ikut mengeburkan diri kedalam gelombang lautan perlawanan itu, adjukan itu adalah adjukan jang timbul daripada keharaan, yakni adjukan jang memang dipaksakan oleh keadaannya perlawanan-hidup; adjukan itu ialah tidak "buat penghasut sahaja", — adjukan itu ialah "nicht als agitatorischen Grunden".

Pendirian tentang soal-perempuan jang kita adjukan diatas ini, pendirian sosial-politis jang mengenai sendi-sendinya kita punja n a t i o - a l e v r i j h e i d s b e w e g i n g (gerakan kemerdekaan) itu, oleh karenanya, tidaklah "terlalu keras". Kita ulangi lagi : pendirian kita jang demikian itu bukanlah pendirian jang terlampau "politikkan", jang oleh karena memang terdorong oleh sesuatu keharaan jang tak dapat dihindari!

Tetapi, kita toch tidak heran djuga, kalau ada setengah orang jang mendakwa kita "terlalu keras", dan mendakwa kita seorang politikus jang tak mengetahui batas. Memang hal jang ba-

ru selamanya membuat onar. Memang mata kita belum semuanya dapat menerima tadjamnya sorot baru. Memang manusia selamanya tak gampang terlepas daripada ikatannya sesuatu kebiasaan! Didalam hal ini kebiasaan itu ialah kebiasaan pendapat, bahwa orang perempuan djanganlah dibawa-bawa didalam urusan-urusan "jang tidak tjotjok dengan sifatnya", "jang tidak tjotjok dengan keperempuanannya", - jang tidak tjotjok dengan "natuurlijke bestemmingnja"!

Riwayat, — djikalau memang ada orang jang mendakwa kita melalui batas, riwayat balik kembali :

Djuga dizaman dahulu, dizaman Revolusi Perantjis dan dizaman pertama daripada abad kesembilanbelas, tatkala orang perempuan buat pertama kali mulai sedikit-sedikit mengindjak lapangnja usaha mentjari "persamaan-hak"; djuga dizaman jang kemudian daripada itu, tatkala kaum perempuan itu dibawah kibarannya bendera merah mulai diadjak ikut berdjoang merobah sama sekali aturan-aturannya pergaulan-hidup jang kapitalistis itu; djuga dizaman jang dekat-dekat ini, tatkala kaum ibu di Mesir, di Turki, di India, di Djepang dan lain-lain mulai djuga menaiki mimbar politik; — djuga dizaman "overgang" itu semuanya, maka aksi kaum perempuan itu hanjalah menemui tjelaan dan tjertjaan belaka. Dengarkanlah misalnja bagaimana didalam Revolusi seorang pemimpin radikal jang bernama Chaumette melabrak pergerakan kaum perempuan jang dipandangnja melewati batas keperempuanannya itu : "Semendjak kapankah, orang perempuan boleh membuang keperempuanannya dan mendjadi laki-laki? Semendjak berapa lamankah adanja ini kebiasaan, jang mereka meninggalkan urusan rumah tangga dan meninggalkan tempat baji, dan datang ditempat-tempat umum untuk berpidato-pidato, masuk dalam barisan-barisan, pendeknja mendjalankan kewadjaban jang oleh kodratnja alam sebenarnya diwadjabkan pada orang laki-laki? Alam berkata pada orang laki-laki : peganglah kelaki-lakianmu! Perlombaan-perlombaan kuda, pemburuan, pekerdjaan tani, politik dan berdjenis-djenis pekerdjaan berat jang lain-lain, — itulah sudah kamu punja hak! Kepada orang perempuan alam berkata : peganglah keperempuananmu! Pemelihara anak-anakmu, bagian-bagianmu kerdja rumah tangga, manisnja kepahitan mendjadi ibu, — itulah kamu punja kerdja! Wahai, perempuan jang bodoh, apakah sebabnja kamu ingin mendjadi laki-laki?..... Atas namanja alam, tinggallah didalam sifatmu sekarang....."

Tetapi toch..... walaupun berpuluh-puluh alasan-alasan jang ditjarikan dan diadjukan untuk mentjegah "kegilaannya" kaum perempuan jang "lupa akan keperempuanannya" itu; walaupun rintangannya kaum-kaum ala Chaumette

dizaman dahulu dan dizaman kemudian, jang misalnja begitu memarahkan Bebel, sampai kaum itu olehnja disebutkan "kaum kukuk-beluk jang ada dimana-mana tempat jang gelap dan mendjadi kaget dan geger, kalau ada sinar terang djatuh memasuki kegelapannja itu", — waktu semua tjegahan dan halangan itu, maka tak urunglah kaum ibu kini ikut menggetarkan udara pergerakan di Eropah dan Amerika, dan ikut menggogjangkan tiang-tiangnja pergaulan-hidup dinegeri-negeri Barat itu. Dan dinegeri-negeri Asia-pun, — wahai apakah sebabnja kaum ibu di Indonesia kebanjakan masih tidur? —, dinegeri-negeri Asia-pun kaum ibu tak sedikit suaranya ikut mentjampuri dengungnja suara pergerakan-merdeka, tak sedikit tenaganja ikut mendorong terdjangnja pergerakan bangsa. Bukankah dinegerinja pendekar-puteri Sun-Soong Ching Ling, Srikandi isterinja Dr. Sun Yat Sen, bukankah di Negeri-Naga itu kaum perempuan, jang menjokong pergerakan nasional sekuat-kuatnja dengan bekerdja dikantor-kantor tjetak, berpidato dipinggir-pinggir djalan, mengadakan pemogokan-pemogokan kaum buruh, malahan maju kemedan peperangan memanggul bedil? Bukankah di India ialah kaum perempuan, jang menghaiatkan kekuatannja pergerakan bangsa "dengan mereka punja keberanian jang tak dapat ditakar, kekuatan kemauan, keridlaan mengorbankan diri, jang memang mendjadi wataknja keperempuanan", dan bukankah di India itu djuga seorang puteri, Sarojini Naidu, jang menuntun Indian National Congress jang keempat-puluh? Bukankah kaum perempuan, jang sebenar-benarnja mendjadi pengadju-adju kaum laki-laki Mesir didalam hal mengedjar kemerdekaan bangsa, sehingga "kaum laki-laki itu sebenarnja hanya terbawa lanjut didalam aliran kekuasaannja kaum perempuan, dan oleh karenanja hanya mendjadi ekor daripada lajang-lajang Nasionalisme Mesir? Bukankah di Mesir itu orang perempuan djuga, jakni isterinja, jang meneguhkan hatinja Saad Zuhul Pasha dengan kata-kata: "djangan takut ini buat Mesir!", tatkala Sang Pasha dadanja diterdjang pelornja seorang penghianat bangsa? Bukankah di Turki ialah kaum perempuan, jang ikut membela bangsa, mendjeritnja Halide Edib Hanum, jang kadang-kadang, "sedang kapal-kapal udara dari kaum sekutu bersambar-sambaran kian kemari mengelilingi menara-menara, dengan api-pidatonja mengobarn gobarkan hatinja (electrified) suatu rapat dari duaratus ribu pendengar, jang memprotes halnja Smyrna diduduki oleh bangsa Griek" — dan jang belakangan djuga ikut memegang bedil diatas medan peperangan mengusir musuh? Pendek kata..... bukankah hampir diseluruh Asia itu w a l a u p u n tjegahnja kaum kuno adat-istiadat, w a l a u p u n halangannja kaum fanatik agama, w a l a u p u n rintangannja kaum kolot politik, kaum perempuan djuga ma-

kin maju kedepan mengisi barisan-barisan jang terkemuka daripada balatentara kebangsaan, makin maju kedepan diatas lapangannja soal perempuan sosial-politis sebagai jang kita maksudkan itu?

Bahwasanja: ini memang desakannja zaman! Dan sebagai jang sudah kita katakan dimuka: kalau zaman itu memang sudah mende-sakkan djuga k i t a punja kaum ibu keatas lapang sosial-politis itu, kalau zaman itu memang sudah mendjalankan segenap k e h a r u s a n n j a diatas kita punja kaum puteri, maka mereka pastilah ditemukan djuga beribu-ribu diatas lapang sosial-politis itu, dan pastilah kita lalu mendapat djuga k i t a punja Sun-Soong Ching Ling, kita punja Halide Edib, k i t a punja Sarojini Naidu!

Maka kita yakin: zaman itu pada saat ini memang sudah mulai mendjalankan kerdjanja..

Pembatja djangan salah faham. Kita tidak menulis, bahwa soal "keperempuanan" harus diabaikan: kita tidak suruh meremehkan soal persamaan-hak dan soal persamaan-deradjat. Kita hanya memperingatkan, bahwa soal "keperempuanan" dan "vrouwen-emancipatie" tidaklah boleh didjadikan soal jang penghabisan. Kita hanya memperingatkan, bahwa dibelakang dua soal ini, seolah-olah melingkupi dua soal ini, masih adalah lagi soal jang lebih besar dan lebih lebar lagi, jakni soal n a t i e-emancipatie adanja! Dan djauh daripada menjuruh mengabaikan soal "keperempuanan" itu, djauh daripada menjuruh meremehkan soal vrouwen-emancipatie itu, maka kita disini memperingatkan, bahwa soal natie-emancipatie itu tidaklah dapat diudarkan dengan sesungguhnya, tidaklah dapat diselesaikan dengan sehabis-habisnja, k a l a u soal "keperempuanan" dan soal "vrouwen-emancipatie" t i d a k d i u d a r k a n djuga. Tiga soal ini adalah bergandengan satu sama lain; tidak soal ini adalah menjerapi satu sama lain!

Oleh karena itu, maka hendaklah kaum perempuan Indonesia senantiasa memperhatikan k e t i g a - t i g a n j a soal ini didalam t a l i p e r h u b u n g a n n j a satu dengan jang lain. Hendaklah kaum puteri senantiasa memperingati dan senantiasa menjubur-njuburkan "wissel-werkingnja" antara tiga soal tahadi. Hendaklah mereka misalnja bekerdja sekeras-kerasnja buat mentjapai persamaan-hak, tidak untuk persamaan-hak itu sahadj, tetapi dengan niat jang tertentu dan keinginan jang keras, menghilangkan barang apa jang memberat-berati kakinja atau menghalang-halangi langkahnja didalam perdjaulan ikut mengedjar keselamatan bangsa. Hendaklah mereka misalnja djuga, dengan setinggi-tingginja budi dan semulia-mulianja tenaga mendjalankan kewadajiban "keperempuanannja" mendidik putera-puteranja, dengan keinsjafan dan keridlaan-niat jang tertentu, sebenarnja mendi-

putera-puteranja n a t i e: — Hendaklah mereka terutama terhadap pada kewadajiban "keperempuanannya" mendidik anak-anaknya itu, maka insjaf dengan seinsjaf-insjafnja, bahwa amat-tjelakanja bangsa sebenar-benarnya adalah didalam genggamannya mereka itu. Hendaklah mereka oleh karenanja, perempuannja bertabiat sebagai ibu bangsa Besar.....

De man heeft grote kunstwerken geschapen; de vrouw heeft de mens geschapen; de Grote moeders maken een groot ras.

Memang! Didalam pertanyaan: Besar atau tidak besarnya kaum ibunya, didalam pertanyaan itu buat sebagian adalah terletak djawabnja pertanyaan akan selamat atau tjelakanja sesuatu bangsa. Ibu-ibu kita Besar, atau ketjil; ibu-ibu kita sadar atau ibu-ibu kita lalai, — itulah buat sebagian berisi djawabnja soal Indonesia akan lahir atau Indonesia akan hantjur.....

Tidakkah Mustapha Kemal Pasha djuga berkata, bahwa kita punja kemerdekaan, kebangsaan, kekuasaan, dan lain-lain hal jang bagus, adalah tergantung dari pada kebudiannya kita sebagai puteri-puteri didalam hal didik-mendidik? Tidakkah budiman pula kalau seorang patriot murmur jang djuga insjaf akan harganja "Ibu-sar" itu, memudjikan supaja; bilamana tak cukup uang sekolah untuk dua anak, lebih baik tak perempuan jang lebih dulu diselamatkan, yakni "oleh karena ialah jang akan menjadi ibu, oleh karena pendidikan itu mulainya sudah pada waktu memberi air susu"?..... Mengkasannya kata: buat kaum perempuan Indonesia, adalah ber-timbun² banjaknja kerdja jang menunggu. Didalam tiap² lapisan, didalam tiap² bagian baik bagian "keperempuanan", maupun bagian "vrouwen-emancipatie", maupun "natie-emancipatie", — didalam tiap-tiap bagian itu, jang begitu menjerupai satu sama lain, sehingga pengabaian salah satu daripadanya sudah membat tak sempurnanja hasil dan oleh karenanja harus diperhatikan semuanya bersamaan, didalam tiap-tiap bagian itu mereka sangatlah rang madjunja.

Moga-moga Kongres Mataram menginsjafi hal ini. Moga-moga kongres itu bukan kongres kaum perempuan sahaja, tetapi ialah sebenar-benarnya kongres puteri-puteri Indonesia jang sedjati. Moga-moga impian kaum putera-putera Indonesia jang kita kutip dibawah ini, dapat terakbul:

Moga-moga kongres itu buat kita semua berarti pembaharuannya Zaman!

"Sudah lama bunga Indonesia tiada mengeluarkan harumnja, semendjak sekar jang terkemudian sudah mendjadi laju. Tetapi sekarang bunga Indonesia sudah kembang kembali, kembang ditimpa tjahaja bulan persatuan Indonesia; dalam bulan jang terang benderang ini, berbau-lah sugandi segala bunga-bunga jang harum dan menarik hati jang tahu akan harganja bunga sebagai hiasan alam jang diturunkan Tuhan Ilahi. Kembangnja bunga ini, ialah bangunnja bangsa Indonesia menurut langkah jang terkemudian sekali, didahului oleh bangunnja laki-laki Indonesia beserta pemudanja. Langkah jang terkemudian, tetapi djedjak jang pertama sekali dalam sedjarah Indonesia, dan permulaan zaman baru.

Sudah lama Indonesia kehilangan ibu, sudah lama Indonesia kehilangan puterinya, tetapi berkat: disinari tjahaja persatuan Indonesia bertemulah anak piatu dengan ibu jang disangka sudah hilang, berdjabatan tanganlah dengan puteri jang dikatakan sudah berpulang. Pertemuan anak piatu dengan ibu kandung, ialah saat jang semulia-mulianja dalam sedjarah anak piatu jang beribu kembali. Saat ini tiada dapat dilupakan: sedih dan suka, pedih pilu bertjampur-baur, karena kenang-kenangan jang sudah berlaku dan oleh karena nasib baru jang akan dimulai. Baru sekarang Persatuan Indonesia ada romantiknja; apa guna gamelan dalam pendopo kalau tiada dibunjikan, terletak sahaja djadi pemandangan kaum keluarga turun-temurun? Gamelan Indonesia berbunji kembali, berbunji dalam pendopo Indonesia dan melagukan persatuan Indonesia, pada waktu bulan purnama-raja, penuh dengan bau bunga dan kembang jang harum. Indonesia piatu sudah beribu kembali".

"Suluh Indonesia Muda", 1928.

C. V. IBAGAN

Djalan Lemahwungkuk no. 29
TJIREBON

Import

Export dan

Perdagangan Umum.

KETENTUAN-KETENTUAN PEMBIAJAN PEMBELIAN DEvisa

(Keputusan Presidium Kabinet Dewikora R.L. No. Aa/5/55/1966, tgl. 28-4-1966)

Membatja :

- a. surat Menteri Iuran Negara kepada Wakil Perdana Menteri III tanggal 26 Djanuari 1966 No. P.M.P.P.U. 1-1-5 tentang penundaan pembajaran iuran impor;
- b. surat Menteri Urusan Bank Sentral a.l. kepada Presidium Kabinet Dwikora tanggal 25 Maret 1966 No. 196/UBS/UPK/66 tentang iuran impor.

Menimbang :

bahwa perlu mengadakan beberapa ketentuan ketentuan tentang pembiajan pembelian devisa dengan kurs baru.

Mengingat :

1. -Penetapan Presiden No. 28 tahun 1965;
2. Pasal 2 Keputusan Presidium Kabinet Dwikora No. Aa/D/154/tahun 1965;
3. Keputusan Presiden No. 63 Tahun 1965.

MEMUTUSKAN

Mentjabut segala peraturan-peraturan dan keputusan² jang bertentangan dengan keputusan ini, dan

Menetapkan :

KETENTUAN -KETENTUAN TENTANG PEMBIAJAN PEMBELIAN DEvisa

Pasal 1.

Pembiajan pembelian devisa untuk keperluan Kementerian, Departemen atau Lembaga Pemerintahan lainnja diatur dalam Anggaran Belanja Negara dan menampung nilai lawan devisa berdasarkan ketentuan² dalam Penetapan Presiden No. 28 Tahun 1965.

Pasal 2.

- (1) Pembelian devisa untuk keperluan Perusahaan Negara dibiajai dari keuangan Perusahaan Negara sendiri.

- (2) Dalam hal karena kekurangan likwidita diperlukan tambahan pembiajan, maka Bank Negara Indonesia menurut pertimbangan jang didasarkan atas Ekonomi Negara, memberi kredit seperlunja.
- (3) Bunga terhutang karena kredit tersebut diatas, menurut pertimbangan jang sama diperhitungkan serendah²nja.

Pasal 3.

Pembiajan pembelian devisa oleh swasta disesuaikan dengan politik perkreditan pada umumnya.

Pasal 4.

Penundaan² pembajaran iuran impor jang telah diberikan oleh Presidium Kabinet Dwikora dirubah dan disesuaikan dengan ketentuan keputusan ini.

Pasal 5.

Hal² jang belum diatur dalam keputusan ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Agar supaja setiap orang mengetahuinja memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannja dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Djakarta,
pada tanggal : 28-4-1966.

**WAKIL PERDANA MENTERI R.L.
BIDANG EKONOMI KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN**

t. t. d.

(HAMENGGKUBUWONO IX)

VARIA BERITA NUSANTARA

JEH

Gubernur Propinsi Atjeh Brigdjen Njak Adanil mengemukakan dalam pidatonya pada hari-tangtuh ke V Hari Nelajan Nasional yang di-sungkan di Lho' Seumawe, bahwa didalam ta-1966 akan mengalami kelebihan beras sebanyak 100 ton.

Persawahan 2000 Hektar Kosgoro di Atjeh Timur
Kosgoro Atjeh Timur, didalam tahun ini akan dibuka tanah persawahan baru seluas 2000 hektidaerah Ketjamatan Perlak Atjeh Timur.

SUMATRA UTARA.

500 ton kopra ex Djambi dikirim ke Sumatra Utara — Sebanyak 500 ton kopra dari Djambi, tahun ini akan dikirim ke Sumatra Utara, untuk ditjukupi kebutuhan daerah ini jang setiap tahunja memerlukan 4000 ton kopra. Daerah Sumatra Utara sendiri setahunnja menghasilkan 2500 ton kopra, dengan demikian masih kekurangan 1500 ton kopra lagi. Selama ini 1000 ton kopra ditjalkan dari daerah Atjeh, tapi untuk tahun 1966 ini belum ada jang masuk.

Projek Asahan Dan Djalan Raya Sumatra

Pembangunan projek² hydro-elektris Asahan dan Djalan Raya Sumatra jang kini pelaksanaannya kelian seperti djalannya "keong", oleh PMII Sumatra Utara didesak supaja diberi perhatian jang lebih serius lagi agar dapat selesai setjepatnja. Dua Projek Mandataris ini punja arti penting bagi pembangunan ekonomi jang manfaatnja bukan saja buat pulau ini sadja, tetapi meliputi seluruh Indonesia.

SUMATRA BARAT

Desa Barangan penghasil kopra jang kaya — Desa Barangan Ketjamatan VII Koto Padang Pariaman, sejak bulannya menghasilkan kopra rata² 75 ton dengan taksiran harga Rp. 200 djuta (U.L.). Ber-arkannya hal itu rakjat Barangan dalam kehidupan sehari² merupakan rakjat jang mewah, namun manfaatnjanja uang tersebut masih belum produktif. Sedangkan menurut kenyataan, sepantasnjalah desa tsb. didirikan sebuah industri minjak goreng jang biasanja dapat diambil dari uang petani kelapa.

RIAU.

Ekspor melalui Dumai dalam tahun 1965 — Selama periode Djanuari/Desember 1965 telah diekspor melalui pelabuhan Dumai hasil-hasilnya Daerah Riau sebanyak 30.541 ton dan

13.117 M3 kaju, dengan perintjian sbb. : karet — 19.080 ton, kopra — 11.000 ton, kaju — 13.117 M3, gambir — 30 ton, kaju arang — 390 ton, kulit biawak — 1 ton, djelutung — 40 ton. Ekspor tsb. langsung ke negara² konsumen : Djepang : 6941 ton, USA : 6180 ton dan RRT : 4625 ton. Kopra ke Eropa Barat, kaju dan gambir ke Djepang, arangkaju/kulit biawak/getah djelutung ke Hongkong.

SUMATRA SELATAN.

Pelabuhan Bengkulu perlukan perbaikan dan kapal — Penguasa Pelabuhan dan kepala Tjambang PN Pelabuhan Bengkulu T.M. Mughtar, menerangkan bahwa pelabuhan Bengkulu dewasa ini sangat membutuhkan biaja bagi perbaikan dan hubungan dengan kapal² ke daerah lain untuk membantu mengembangkan kehidupan rakjat sehari² serta perekonomian pada umumnya. Djuga telah diadjukan permintaan, agar Bengkulu dapat mengadakan ekspor langsung ke luar-negeri dan tidak lagi tergantung pada pelabuhan-an² Padang, Belawan atau Palembang. Djuga bagaimana pentingnja pelabuhan Bengkulu tersebut, jang biasa memasukkan sandangpangan kebutuhan sehari² penduduk seperti beras, garam, minjak dan barang² klontongan serta menge-luarkan kopi, tjengkeh, lada atau karet slabs untuk dibawa ke Padang, Pasar Ikan dan Pandjang.

Djumlah kapal² ketjil sampai seberat 60 ton jang dapat merapat di pelabuhan Bengkulu maupun kapal² besar sekitar 20.000 ton jang berlabuh pada djarak satu mil dari pelabuhan alam itu, achir² ini tidak begitu banjak lagi dibandingkan dengan tahun² sebelumnya. Dewasa ini kapal² ketjil sekitar 60 ton jang merapat di Bengkulu hanya berdjumlah antara 40 dan 50 setahunnja, sedangkan jang diperlukan kira² dua atau tiga dalam seminggu. Kapal² besar jang mengadakan pelajaran pantai hanya tampak sekitar 30 buah setahunnja, sedangkan kebutuhan dewasa ini sekurang²nja 4 kapal dalam sebulan.

Akibatnja karena kurangnya kapal² tersebut, kini banjak penguasa setempat mengangkut produknya melalui djalan darat dengan menggunakan djalan darat, meskipun djaraknja lebih dekat, tapi biaja pengangkutan tigakali lipat dengan biaja pengangkutan laut. Djuga mengenai hubungan dengan pelabuhan ketjil lainnja dipantai Bengkulu jang pandjangnja 100 mil berkurang dan ini tidak menguntungkan kehidupan perekonomiannya setempat. Lebih² kesulitan transpor tersebut terasa, oleh tempat² seperti

Muko jang penduduknja hanja "dapat keluar" melalui laut, karena djalan darat sudah sangat rusak. Muko² karena itu biasa diberikan djulukan "pulau di daratan".

LAMPUNG

Produksi padi meningkat harga beras turut meningkat — Bukan rahasia lagi produksi padi tahun ini djauh lebih banjak dari tahun² jang sudah, tetapi njatanja harga beras di kota Tandjungkarang dan Telukbetung meningkat dari harga sebelum panen. Kenaikan² itu adalah akibat buruknja djalanraya² jang menghubungi kota Tandjungkarang dengan daerah² ketjamatan jang memproduksi padi, hingga mengakibatkan ongkos pengangkutan membubung tinggi.

Pusat Koperasi Tjengkeh Lampung — Berdasarakan Surat Keputusan Gubernur KDH Propinsi Lampung tgl. 19 April 1966, Pusat Koperasi Tjengkeh (Gabungan) di Daerah Lampung oleh Pemerintah Propinsi Lampung diberi wewenang sebagai Badan Tunggal untuk mengumpulkan/membeli tjengkeh dalam Daerah Propinsi Lampung dan seterusnya menjalurnja/mendjual langsung kepada konsumen tjengkeh keluar daerah Lampung. Keputusan tsb. dikeluarkan berdasarkan pertimbangan, bahwa daerah Lampung sebagai salahsatu daerah penghasil tjengkeh harus memanfaatkan dan menertibkan perdagangan tjengkeh tsb. dalam rangka berdikari untuk mentjegah adanja spekulasi dan manipulasi.

Pelabuhan Pandjang dijadikan Pelabuhan Ekspor — Pelabuhan Pandjang (Lampung) dewasa ini sedang dibangun sedemikian rupa, hingga tjotjok untuk dijadikan pelabuhan ekspor. Untuk pelabuhan antara pulau akan dipergunakan pelabuhan Gudang-Agen, jang sekarang ini hanja dipakai untuk perahu² dan perahu² motor tempel. Pelabuhan ini akan diperbaiki untuk dijadikan pelabuhan antarpulau (coasterhaven).

KALIMANTAN SELATAN

Kalsel tahun 1965 surplus ikan 34.699 ton lebih — Seperti djuga tahun² sebelumnja, daerah Kalimantan Selatan dalam tahun 1965 j.l. telah kelebihan hasil ikan hampir sebanjak jang diperlukannya. Produksi ikan darat dan ikan laut Kalsel dalam tahun 1965 adalah sebanjak 69.586,850 ton, sedang kebutuhannya 34.887,258 ton, sehingga dalam tahun 1965 kelebihan hasil ikan sebanjak 34.699,592 ton. Soal peningkatan produksi ikan tidak mendjadi persoalan bagi Kalsel, demikian Gubernur Kalsel H. Aberani dalam perajaan Hari Nasional Nelajan V, tetapi jang perlu mendapat perhatian dan pemikiran ialah tentang peningkatan mutu dan hygiene ikan sehingga mendapatkan pasaran jang lebih baik.

Gubernur Kalsel mengadjak para nelajan dan pengusaha daerah Kalsel untuk ber-sama² dengan instansi pemerintah memperhatikan kemungkinan pembangunan pabrik tepung ikan didaerah Kalsel. Diandjurkannya kepada pihak Perikanan Darat dan Laut untuk mentjoba menggali sumber devisa jang baru.

KLIMANTAN TENGAH

KABUPATEN KOTAWABINGIN dengan des pertjontohan Pasir Pandjang — Desa Pertjontohan Pasirpandjang jang merupakan Desa Teladan dalam daerah Kabupaten Kotawaringin Barat jang dipalpai seorang sardjana, telah menundjukkan hasil karya dan kegiatan² jang mengesankan. Dalam musim patjeklik di Pangkalan Bun jbl., penduduk desa tersebut telah menghasilkan ubikaju (singkong) dalam djumlah jang besar, hingga member bantuan kepada penduduk sekitarnya dan pegawai negeri didaerah Kabupaten Kotawaringin Barat terutama dalam mendampingi beras sebagai bahan makanan-pokok sehari-hari.

Menurut Bupati KDH Kab. Kotawaringin Barat Drs F.A.D. Patianom, bahwa hasil panen perladangan dan sawah rakjat sendiri. Disamping itu kegiatan rakjat dalam memperlipatgandakan hasil bahan² makanan dan pertanian terus meningkat seperti ubikaju, palawidja, kebun kopi, tjengkeh dan lain² tanaman termasuk tanaman keras.

Dengan tidak mengurangi tugas² pokok para pegawai sehari² dikantor, maka kepada seluruh pegawai didaerah Kab. Kotawaringin Barat dalam tahun 1966 dikenakan "wajib tanam" dan sebagai hasilnya l.k. 80% pegawai negeri didaerah tsb telah mengadakan pekerdjaan tani. Hasilnja tjukup baik, sehingga masalah kekurangan beras (jang biasanja mengharap tundjangan dari Pemerintah) sebanjak 8 kg tiap djiwa, jaitu dalam praktek mendapat penggantian berupa uang) dapat diatasi. Disamping wadjib-tani, djuga kepada seluruh pegawai negeri didaerah itu diwadjibkan pula untuk wadjib-tanam jaitu sajurmajur untuk keperluan para pegawai itu sendiri.

— **Kalteng harus bongkar kekajaan alamnja** — Gubernur KDH Propinsi Kalteng Tjilik Riwut dalam pendjelasannya didepan sidang peripurna DPRD GR Prop. Kalteng baru² ini, menjatakan, bahwa masalah perekonomian Daerah Kalimantan Tengah dengan kekajaan alamnja jang potensil memang tidak dapat disangkal, tetapi persoalan jang dihadapi oleh Daerah ialah: Bagaimana membongkar potensi kekajaan itu agar dapat segera dimanfaatkan. Ditegaskan dalam keterangan Pemerintah Daerah tersebut bahwa prinsip jang dipegang teguh dalam penetapan pokok² kebidjaksanaan dalam bidang ekonomi dan pembangunan Kalimantan tengah, ialah: pertama: berdikari, kedua: mendjadi mekar karena kemekarannya sendiri

ALIMANTAN TIMUR

14.000 nelajan Kaltim dapat kerahkan 3000 perahu untuk pertahanan — Nelajan perikanan di Kaltim jang berdjumlah 14.000 orang dengan 3000 buah perahunja adalah Armada Pangkalan Laut Rakjat Kaltim, jang sewaktu² dapat dipergunakan untuk pertahanan negara. Demikian diumumkan oleh Kepala Dinas Perikanan Laut Kaltim. Kaltim dalam peringatan hari Nelajan Nasional V baru² ini jang bagi daerah Kaltim dipusatkan di Bontang.

Kaltim lantjar ekspor hasil² hutannja — Bulan Februari 1966 ekspor kaju Perhutani jang terdiri dari kaju meranti, agathis dan keruwing diberangkatkan dari pelabuhan Tarakan dan Nunukan menuju Djepang sedjumlah 907,125 meterbubik untuk keperluan projek² Perhutani di Malinau, Sasajap dan pulau Nunukan, baru² ini telah diangkut dipelabuhan Nunukan alat² mesin sebanyak 230 ton jang didatangkan dari Djepang.

Pelabuhan Tarakan sebagai pelabuhan jang diusahakan — Dengan mendahului keputusan dan pengesahan dari Menteri Perhubungan, oleh Kepala Daerah Pelajaran V Bandjarmasin telah menetapkan Pelabuhan Tarakan sebagai pelabuhan jang diusahakan, jang segala sesuatunja jang berhubungan dengan ketetapan tersebut diatur oleh Direktur PN Pelabuhan Daerah V. Penetapan pelabuhan Tarakan mendjadi pelabuhan jang diusahakan itu berlaku sedjak tanggal 1 April 1966, dimana sebelumnya telah dinjatakan sebagai pelabuhan tingkat II.

SULAWESI UTARA

Harga Kopra di Sulawesi Utara — Gubernur Propinsi Sulawesi Utara telah menetapkan harga kopra di daerah Sultara, bahwa terhitung tanggal April 1966 harga kopra terendah untuk petani kelapa sebagai produsen kopra di Propinsi Sultara adalah sebesar Rp. 85,— (delapan puluh lima rupiah nilai baru) per kwintal. Harga kopra af-gudang tanpa karung untuk Prop. Sultara ditetapkan sebesar Rp. 162,50 (u.b.) per kwintal.

SULAWESI TENGGARA

— Pulau Katela — Pulau Katela salahsatu pulau dikepulauan Tiworo Kabupaten Muna jang luasnja 50 x 120 M berpenduduk 200 kepala keluarga atau kl. 1000 jiwa hidup dalam kemakmuran. 100 persen dari djumlah penduduknja hidup dari pentjaharian nelajan dan perdagangan ikan kering, langsung dibawa ke daerah² Djawa Timur, Makasar dan lain² tempat dikepulauan Nusantara. Ditempat ini banjak dibuat perahu² ukuran 40 ton kebawah. Penduduk Pulau Katela rata² tiap bulannja dapat menghasilkan ikan kering 75 ton sebulan; per kwintal harga ditempat antara Rp. 80,— sampai Rp. 85,— (u.b.). Ini berarti tiap kepala keluarga berpenghasilan Rp. 300,— (u.b.) sebulan. Namun demikian masjarakat belum sampai membangun perumahan² jang sempurna, mungkin masih dihindangi kekuatiran akibat keganasan gerombolan di-tahun² jang lalu.

IRIAN BARAT akan dapat barang² hasil industri Indonesia — Irian Barat akan mendapat kebutuhan sehari² masjarakat di Irian Barat. Ini berarti dapat menghemat tigapuluh djuta dollar AS dalam setahun. Pelaksanaan mensupply Irian Barat dengan barang² hasil industri Indonesia adalah dalam rangka usaha penghematan devisa negara, karena selama ini Irian Barat, dalam hal ini dilakukan oleh Sekkib, selalu mengimpor kebutuhan sehari² seperti rokok, sabun, obat gosok gigi, makanan kaleng dll. dari Hongkong, Australia dll. dengan menggunakan devisa negara sebanyak lebih kurang tigapuluh djuta dollar A.S. setahun. Padahal sebagian besar barang² impor tersebut telah diproduksi oleh industri kita sendiri. Dengan dihentikannja mengimpor barang² tersebut, maka devisa tsb. dapat digunakan untuk membeli bahan baku dan spareparts jang dibutuhkan untuk memperlantjar produksi kita, serta melipat-gandakan produksi industri ringan dan dasar kita. Demikian antara lain Major Djen-dral Moh. Jusuf, Menteri Perindustrian Ringan/Dasar setelah selesai mengadakan briefing dengan para asisten Menteri Peringdas beberapa waktu jang lalu.

P.T. ASIA INDAH

Djl. Raya Djembatan Lima 50,

Telp. O.K. 23440, 23140

DJAKARTA I/9

PABRIK ASSEMBLING RADIO TRANSISTOR — TELESONIC

Alamat Kawat : ASIACYCLE

BANK : Bank Negara Indonesia Unit IV.

ANEKA BERITA SINGKAT EKUBANG

GERKOPIN gantikan **KOKSI** — Induk² Koperasi Indonesia dalam rapatnja pada tanggal 5, 6 dan 7 Mei 1966 telah berhasil mewujudkan Gerakan Koperasi Indonesia (**GERKOPIN**) sebagai pengganti **KOKSI** sesuai dengan keputusan **MUNASKOP II/1965**, dan sekaligus memilih/menunjuk Dewan Pimpinan Paripurna.

Susunan Dewan Pimpinan Paripurna adalah sbb. :
Ketua Umum : *Brigdjen. H.M.S. Rahardjodikromo* (**INKOPAD**)

Ketua I : *R.P. Suroso* (**I.K.P.N.**)

Ketua II : *Ediwan* (**I.P.K.I.**)

Pembantu² : *Letkol. (U) Argasisastra* (**PUKADARA**, *R.P. Suroso* (**I.K.P.N.**), *Nj. Ratjih Natawidjaja* (**I.K.K.**), dan *H. Idris Lasahido* (**IKKI**).

Anggota : *Komodor (L) Sardjuno* (**INKOPAL**), *AKEP Taslan Karnadi SH* (**INKOPAK**), *Mutawali (G.K.B.I.)*, *Saleh Sudjani* (**INKOP-TEXI**), (**INKOPERTA**), *Drs. Suno* (**INKOVERI**), *A.Latief Sjah SH* (**GAKOP TJENGKEH**) dan *Timmerman Brahim* (**I.K.K.A.**).

Sekretaris : *Major H. Sarjono* (**INKOPAD**).

* * *

Tugas utama Departemen Pertambangan — Menurut Deputy Menteri Pertambangan *Brigdjen. R. Pirngadie* tugas utama dari Departemen Pertambangan ialah memanfaatkan bahan galian yang sebagian besar belum dieksploitir dan menjaga keselamatan rakjat dalam soal bentjana alam. Departemen Pertambangan akan berusaha membuat rakjat Indonesia mining-minded, sehingga kekayaan alam yang masih dibawah permukaan bumi dieksploitir sepenuhnya guna memajukan industri dan dengan demikian memperbaiki keadaan ekonomi.

* * *

Kesibukan lalulintas pos telegram menurun 50% — Kesibukan lalulintas pos telegram dalam waktu achir² ini (sesudah **Gestok**) menurun lebih kurang 50%. Menurunnja kesibukan lalulintas pos telegram tersebut erat hubungannja dengan menurunnja kesibukan dunia perdagangan kita, yang pada waktu achir² ini kelihatan sangat "lesu". Demikian a.l. pimpinan **PN Pos** dan dan **Telkom** dalam laporannja kepada Menteri Perhubungan **Laksamana Muda (L) Jatidjan** ketika beberapa waktu yang lalu mengadakan penindjauan "on the spot" ke Kantorpos Besar **Klas I (Djl. Pos)**, Kantor Sentral Telegram (**Djalan Tamrin**) serta Kantor Telekomunikasi yang baru di **Djl. Merdeka Selatan**.

* * *

Tiap² kapal diharuskan angkut pos sebanjak²nya — Dalam rangka peningkatan djasa kepada umum, Deputy Menteri Perhubungan **Laut Komodor (L) Susatyo Mardi** telah menginstruksikan kepada semua Kepala Daerah Pelajaran/Penguasa Pelabuhan diseluruh Indonesia agar

mengharuskan tiap² kapal mengangkut pos sebanjak-banjaknja. Pelaksanaan dan pengawasannja hendaknja dilakukan oleh Penguasa Pelabuhan setempat. * * *

Telegram² untuk ekspor — Telegram² untuk ekspor mendapat prioritas dalam pelajanan dalam rangka membantu melantjarkan usaha² dalam bidang ekonomi negara, demikian keterangan Kepala Kantor Telegram **Djakarta**. Dalam hubungannja ini Kantor Sentral Telegram di **Djakarta** akan memberikan prioritas mutlak terhadap telegram², baik Pemerintah maupun swasta yang menjangkut ekspor. Untuk kelantjaran pelaksanaan telegram² ekspor oleh pengirimnja dapat ditundjukkan di loket telegram Gedung Telekomunikasi **Merdeka Selatan 12**. Untuk keterangan² lebih landjut dapat menghubungi Kepala Kantor Telegram. * * *

Potensi Nasional Perusahaan² Perindustrian Tekstil perlu ditingkatkan — Akibat daripada **Gestapu** dan "salahurus" yang baru lalu mengakibatkan ekonomi kita berantakan sehingga perlu adanya approach baru dan product-schedule setelah ada ketetapan **RIB** untuk Deperintek, demikian ditandaskan oleh Menteri **Hadi Thajeb** ketika menindjau dari dekat **Patal Senajan**.

Banjaknja mesin² pertekstilan termasuk mesin pemintalan yang tidak djalan/bekerdja tidak jalin karena setiap pabrik selalu dalam produksinjnja mengadakan tjadangan mesin (reserve) dan ada pula mesin² yang tidak bekerdja disebabkan kekurangan bahan² baku/penolong. Kesulitan bahan baku kapas oleh **Patal Senajan** dalam kenjaan pada achir² ini akan diatasi dengan mengadakan penanaman kapas sendiri. Untuk itu telah diadakan pertjobaan penanaman kapas seluas 5 hektar dalam pekarangan pabrik tsb. Menurut Menteri **Perindustrian Tekstil/Kerajinan Rakjat Hadi Thajeb**, bahwa usaha penanaman kapas tak perlu selalu diusahakan oleh Pemerintah. Swastapun harus berusaha dalam menanam kapas ini, walaupun kita hingga sekarang belum mendapatkan bibit kapas yang sesuai benang dengan iklim Indonesia untuk mendapatkan hasil dan kwalita yang bagus dan memuaskan, sehingga dengan demikian pertjobaan² penanaman kapas hendaknja diikutsertakan pula badan² lain dan diusahakan setjara ilmiah. Demikian a.l. Menteri **Hadi Thajeb**. * * *

20 Wisatawan Perantjis Kundjungi Sumbar.

Duapuluh orang wisatawan Perantjis pada achir bulan **Djuli j.a.d.** akan berkundjung ke **Sumatra Barat** menjaksikan dari dekat keindahan alam **Minangkabau** serta untuk mengetahui adat istiadat penduduknja. **Danau Manindjau**, **Singkarak**, **Ngarai Sianok**, **Taman Nirwana** akan djadi objek kundjungan wisatawan² itu.

* * *

APA SEBAB PEREKONOMIAN KITA MEROSOT DISEGALA BIDANG ?

Wakil Panglima Besar KOGAM Djendral A.H. Nasution dalam prasarannya didepan Munas Ekonomi telah mengemukakan sebab² kemerosotan perekonomian kita yang akhir² ini meliputi segala bidang, produksi, ekspor, dajabeli rakyat dsnja.

Dikemukakannya sebab yang pokok jaitu kemiskinan ekonomi yang tidak memadai, yang telah menjuburkan segala penjelewengan², korupsi, kemunafikan sehingga kita dewasa ini menderita suau perekonomian yang benar² parah padanya.

Disamping sebab pokok kemerosotan ekonomi tersebut, dikemukakannya pula tiga sebab lain yang tidak dapat kita sangkal, jaitu :

- *Pertama* : salahurus dan korupsi
- *Kedua* : kebobrokan PN² dan PDN². Hal ini terbukti dari hasil Operasi Budi yang pernah dilantjarkan dibawah pimpinan Djendral Nasution sendiri dimana dalam waktu 3 bulan sadja telah dapat menertibkan 11 miliar rupiah (lama) yang diselewengkan PN²/PDN².

- *Ketiga* : Anggaran yang besar yang dikeluarkan untuk keperluan Trikora, Dwikora dan pembangunan Angkatan Bersendjata kita.

Sebab ketiga ini, demikian Djendral Nasution, seringkali dikemukakan dan dibesar²kan oleh Nekolim.

"Punt" yang perlu diperhatikan

Selanjutnya Wapangsar KOGAM mengemukakan pula beberapa "punt" atau pokok pikiran yang hendaknja diperhatikan/dipeladjarai Musjawarah, jaitu :

— Rehabilitasi disegala bidang aparat ekonomi Pemerintah, PN², PDN², Koperasi, Swasta maupun yang ditangan rakyat. Aparat Pemerintah hendaknja mengabdikan pada perekonomian rakyat. Djadi tidak sebaliknya, seperti di-masa² yang lalu seringkali dipraktekkan.

— Sikap ambtenarisme dalam PN²/PDN² dsb. yang mempunjai akibat yang sangat negatif, perlu dikikis.

— Swasta parasitis harus diberantas. Tapi swasta yang "bersih" memang tidak bertentangan dengan pasal 33 UUD '45 yang djadi dasar hukum perekonomian kita.

— Memperbaiki perekonomian kita harus pula dibarengi dengan perbaikan mental segenap lapisan masyarakat kita. Hiduplah sederhana, djanngan berlebihan dan sesuaikan diri dengan penderitaan rakyat.

— Masalah djumlah pegawai negeri yang terlampau banyak yang memakan sebagian besar anggaran belandja kita, harus ditjari pemertjahan yang bidjaksana. Bagaimana memindahkan mereka ini ke sektor produksi, sebab pemberhentian begitu sadja tidak mungkin.

— Harus ada keseimbangan antara Pusat dan Daerah. Daerah hendaknja diberi penghasilan, wewenang dsb.nja. Atau dengan kata lain swadaja Daerah harus ditingkatkan.

— Pembangunan Masyarakat Desa disegala bidang hendaknja direalisir secepat mungkin dengan setjara swadaja dan tidak usah dengan bantuan luarnegeri.

— Rehabilitasi infrastruktur.

— Penggunaan atau pemanfaatan lulusan Universitas, Perguruan Tinggi atau Akademi dan mahasiswa² bagi masyarakat. Dengan kata lain menurbakan mereka untuk pembangunan/perbaikan kehidupan ekonomi masyarakat.

— Penjelesaian masalah perantauan asing, terutama perantauan Tionghoa. Dalam hal ini kita tidak inginkan adanya minorita, kita menghendaki adanya integrasi disegala bidang kehidupan. Sedang PP 10 kita djalankan setjara konsekwen untuk mengahiri dominasi modal asing. Tapi dalam hal ini, kita tidak boleh terdjerumus menjadi rasialis, anti Tionghoa. Sebab ini akan merugikan perdjjuangan kita dan lagi pula bertentangan dengan Pantjasila dan agama kita.

Demikian a.l. prasaran Wapangsar KOGAM Djendral A.H. Nasution didepan Munas Ekonomi.

P.T. BADAN TEKSTIL NASIONAL

Djl. Oto Iskandardinata 79

BANDUNG

Mengerdjakan :

— PERTENUNAN

— PENTJELUPAN

— PENJEMPURNAAN TEKSTIL.

Commodities

EKSPOR HASIL PERKEBUNAN TRIWULAN I/'66 — Ekspor hasil perkebunan kita dalam triwulan pertama tahun ini meliputi jumlah lebih dari US\$ 35 djuta, dan ini menundukkan hasil ekspor jang mengembirakan dari tahun sebelumnya, demikian a.l. Menteri Perkebunan Drs Frans Seda. Ekspor dari hasil berbagai perkebunan jang sudah direalisir dalam triwulan pertama tahun 1966 ini jaitu : dari PP Dwikora — US\$ 6.001.576; PPN Tembakau — US\$ 13.746.790; PNN Karet — US\$ 11.504.552,20; PPN Aneka Tanaman — US\$ 9.999.561,15. Hasil ekspor triwulan I tersebut dibandingkan dengan hasil² pada tahun sebelumnya umumnya menunjukkan angka menaik.

EKSPOR PRODUKSI PN² KIMIA — Beberapa perusahaan negara di lingkungan Komando Pelaksana PN Industri Kimia tahun jang lalu telah mengekspor sebagian hasil produksinja guna memperoleh devisa untuk mentjukupi kebutuhan akan bahan² baku dan penolong serta spareparts. Tahun ini, ekspor itu direntjanakan akan dilandjutkan. Menurut Kepala Humas Kopel PN Industri Kimia, pada tahun 1965 telah diekspor 35.000 M/T garam dengan hasil devisa US\$80.000, urea sebanjak 15.000 M/T (devisa US\$ 125.000), semen 50.000 zak (US\$ 600.000) dan amonia 2.000 ton dalam djangka waktu 5 tahun dengan harapan devisa US\$ 200.000.

Apabila penjediaan devisa untuk keperluan pabrik tidak terlaksana, djuga pupuk urea akan diekspor lagi dalam tahun 1966 sebanjak 15.000 ton untuk mendapatkan devisa sebanjak US\$ 1.267.500.

* * *

PERHEWANI ekspor burung/unggas ke Nederland — Pada pertengahan bulan Pebruari jang lalu oleh PN Perhewani telah dikirim djenis burung/unggas ke Nederland jang merupakan tjontoh untuk diekspor. Dalam penerbangan tersebut digunakan pesawatterbang KLM dengan hasil memuaskan. Menurut rentjana selandjutnja dalam waktu tidak lama lagi akan dikirim pula djenis² burung kakaktua, bajan, gelatik dan djalak. Diharapkan ekspor unggas selandjutnja selain dikirim ke Nederland djuga ke Hongkong.

* * *

PRODUKSI INDONESIA MENARIK PENGUSAHA BELANDA

Suatu hal jang mengembirakan setelah norm kembali hubungan R.I.-Nederland, maka pengusaha dari Nederland mulai tertarik pada produksi Indonesia. A.l. usus kering guna pembuatan sosis dan kulit hewan seperti jang djajatakan oleh N. ALTRACO kepada PN PERHEWANI baru² ini oleh Managernja J. De Han.

* * *

KERADJINAN TANGAN INDONESIA

Indonesia jang mempunjai industri² keradjinan jang tersebar diseluruh pelosok tanahair mempunjai potensi penghasil devisa, dan boleh dikatakan tidaklah membutuhkan devisa. Tetapi untuk itu perlu mendapat bimbingan dari pemerintah, baik dalam bentuk bimbingan mutu maupun dalam bahan baku.

Hasil industri keradjinan tangan Indonesia ini banyak diminta negara² lain, jang berarti dapat menghasilkan devisa jang tidak sedikit. A.l. akhir ini negara² Eropa seperti Italia dan Perantjis serta negeri Belanda meminta hasil² keradjinan Indonesia a.l. topi² pandan, benda² ukiran Bali dll.

* * *

KARET INDONESIA

Lnampuluh persen ekspor karet Indonesia adalah dari karet rakjat. Usaha² replanting dan upgrading karet rakjat kini menundukkan hasil² jang mengembirakan. Mengenai angka² upgrading dalam tahun 1964 perbandingan higher-grade produksi karet dengan lower-grade menunjukkan perbandingan 55 : 45, tapi untuk tahun 1965 mendjadi 66 : 34. Sedang target perbandingan jang dikehendaki adalah 70 : 30. Produksi karet rakjat dalam tahun 1963 = 386.000 ton, tahun 1964 = 420.000 ton dan tahun 1965 = 485.000 ton.

* * *

TUMBUH²AN OBAT INDONESIA

BPU Farmasi Negara dalam tahun 1965 telah mulai mengekspor tumbuh²an bahan obat orthosiphon dan rauwfolia serpentina ke Djerman Barat dan Tjekoslowakia. Garam² kina, quinidine, resin dan alkoleid adalah bahan² farmasi lainnja telah diekspor oleh Indonesia. Permintaan dunia akan kina meningkat sekali dalam tahun 1965 sehingga tak dapat kita penuhi. Lagipula pemasukan kulit kina mengetjewakan dalam tahun itu disebabkan larangan ekspor kulit kina tidak diindahkan. Garam kina jang diekspor PN Farmasi Bhineka Kini Farmasi hampir keseluruh dunia, jaitu ke Belanda, Djerman Barat, Denmark, Amerika Serikat, RRT dan Bulgaria.

* * *



Perusahaan
NIAGA NEGARA

P.N. PEMBANGUNAN NIAGA

Kantor Pusat: Hajam Wuruk No. 127 Djakarta

Telepon No. O.K: 21401 - 02 - 03

Melaksanakan Triprogram Pemerintah, dalam bidang perdagangan teknik.

1. Impor/Distributor :

Bahan baku; bahan bangunan; Obat²an pharmasi; bahan² kimia tehnik; mesin² kimia tehnik; mesin² perkebunan/pertanian; mesin² industri ringan/berat; mesin² logam/kaju; grafika; alat² besar & Road rollers; mesin² diesel & tenaga penggerak utama arus lemah; arus kuat; mesin² sandang (pemintalan, peradjudan, pertenenan, Finishing & printing).

2. Export/interinsulair :

Karet, kopra, hasil² bumi dan barang² tehnik.

3. Pêmbangunan projek² :

Perentjana & pelaksana; melengkapi; reparasi & revisi, Projek² umum dan industri.

bang² Utama : Djakarta, Bandung, Semarang, Surabaja, dan Medan.
bang² biasa : Palembang, Padang, Banda Atjeh, Makasar dan Manado.
b. Tjabang : Tjirebon.
rwakilan di luar Negeri : Tokyo, Amsterdam dan Manila.

EXPORTERS

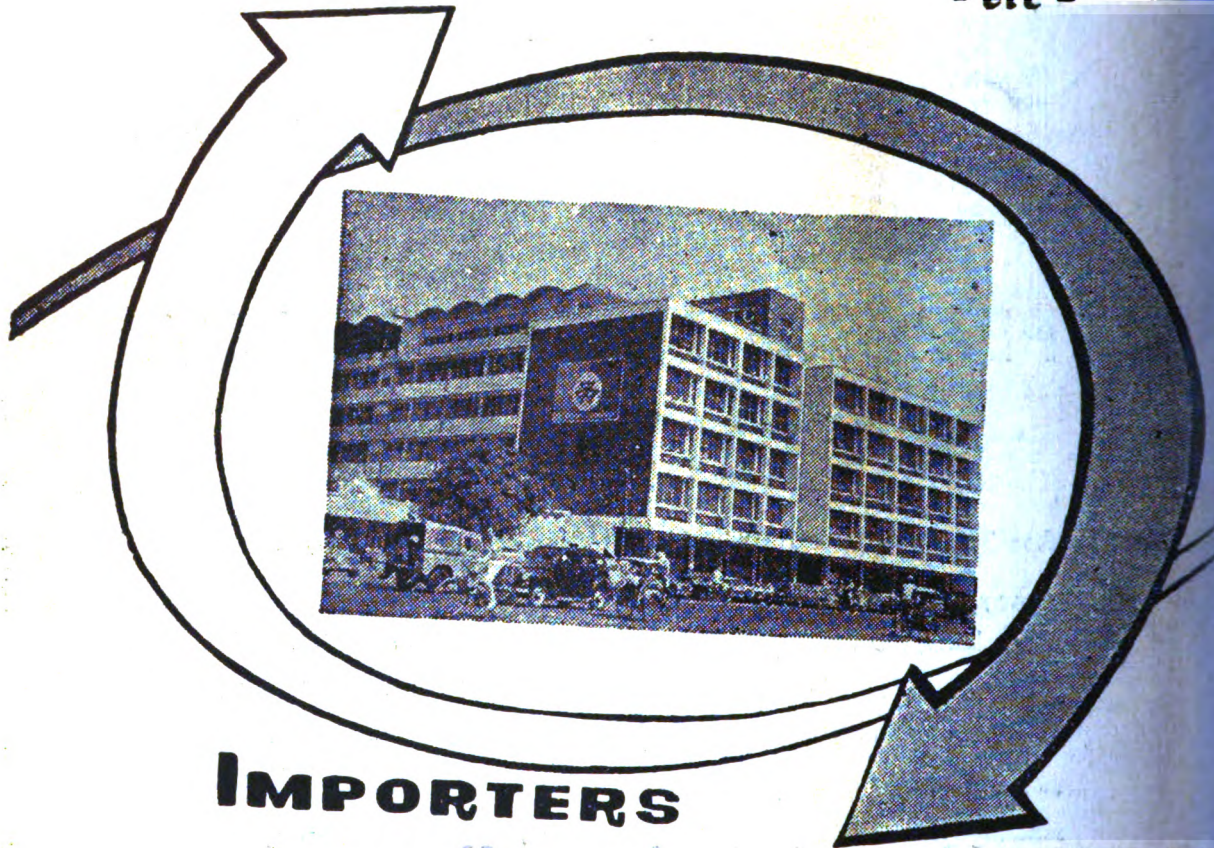
89097612287



B89097612287A



RUBBER - COPRA - COPRA CHIPS
- PEPPER - COFFEE -
NUTMEGS - CASSIA VERBENA
MANIOC MEALS - OIL SEEDS
- etc -



IMPORTERS

TEXTILES - DYE STUFFS - RAW COTTON
STAPLE FIBRE
PAPER - STATIONERY
WHEAT FLOUR
FERTILIZERS & OTHER CHEMICALS
IRON & STEEL PRODUCTS
BUILDING MATERIALS
MACHINERIES - TOOLS & SPARE PARTS



PANTJA NIAGA



89097612287



b89097612287a